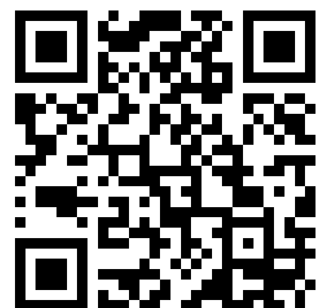


INDONESIA MEMBANGUN

JILID IV

SUSUNAN PELAKSANA / *THE EXECUTIVES*

Penasehat Khusus / *Adviser*	:	**Drs H Feisal Tamin.**
Pemimpin Umum / *Project Officer*	:	**Ida M Junus.**
Pemimpin Redaksi-Penanggungjawab / *Editor-in-Chief*	:	**Fauzie Amrullah.**
Penasihat Ahli / *Experts*	:	**Zulharmans,** **Nasruddin Hars.**
Penterjemah / *Translator*	:	**Ngasup Singarimbun & Associates.**
Dewan Redaksi / *Editorial Board*	:	**Zulharmans,** **Nasruddin Hars,** **Ida M Junus,** **Fauzie Amrullah.**
Editor Photo / *Photo Editorial*	:	**Ida M Junus.**
Staf Redaksi / *Editorial Staff*	:	**Hillmansyah,** **Gaffardi,** **Akmal Nasution,** **Masril,** **dan lain-lain.**
Sekretaris Redaksi / *Secretary to the Editorial Board*	:	**Sri Purwanti.**
Bagian Umum / *General Division*	:	**Nana Ruddyana,** **Hikmah.**
Koordinator Penata Letak / *Lay-outman Coordinator*	:	**Widayoko.**
Koordinator Pemasaran / *Marketing Coordinator*	:	**Herry Virgo.**
Produksi / *Production Division (Setter Division)*	:	**Rianawati,** **Ratna Tarigan,** **Irianto.**
Fotografer / *Photographer*	:	**S. Arifin,** **Malik Habe.**
Penasehat Hukum / *Lawyer*	:	**Drs. Rudy T Erwin SH.**
Penerbit / *Publisher*	:	**PT DUMAS SARI WARNA**
Percetakan / *Printing*	:	**PT. Desanti Grafika.**
Color Separation	:	**PT. Ardiansa.**

DAFTAR ISI / *INDEX*

Propinsi BALI



SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa buku "Indonesia Membangun" khususnya mengenai Propinsi Daerah Tingkat I Bali ini dapat diterbitkan, meskipun pemuatan materinya secara garis besarnya saja, namun manfaatnya cukup besar, karena materi yang disajikan antara lain menyangkut monografi Daerah Bali, pembangunan Daerah, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan bidang sosial dan pembangunan Bali menuju pulau taman.

Pada dasarnya pembangunan Daerah Bali menitik beratkan
— sektor pertanian dalam arti luas.
— sektor kepariwisataan dengan sektor industri kecil dan kerajinan tangan sebagai penunjangnya.
Sedangkan sektor-sektor lainnya dikembangkan sejalan dengan pembangunan sektor-sektor prioritas serta perkembangan umum di Daerah Bali sendiri.

Sejalan dengan kebijaksanaan Nasional yaitu :
Trilogi pembangunan, delapan jalur pemerataan dan delapan sukses perlu lebih dimantapkan lagi dalam REPELITA-REPELITA selanjutnya, diantaranya peningkatan perhatian terhadap program sosial budaya yang melandasi segenap aktivitas pembangunan sesuai dengan kondisi obyektif Daerah Bali yang perlu diprogramkan secara lebih mantap lagi, dalam rangka menjaga keunikan Bali dalam mencapai kemajuan terutama program pendidikan, agama dan kebudayaan, disamping program-program lainnya yang tidak kalah pentingnya.

Demikian sambutan singkat saya dalam penerbitan buku "Indonesia Membangun" semoga ada manfaatnya.

Denspasar, 3 April 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI



MANTRA


BALI DWIPA


LAUT BALI
SELAT BALI
SELAT BADUNG
SELAT LOMBOK
SAMUDERA INDONESIA (HINDIA)
SINGARAJA
NEGARA
TABANAN
DENPASAR
GIANYAR
BANGLI
KELUNGKUNG
AMLAPURA
NUSA PENIDA
NUSA CENINGAN
NUSALEMBONGAN
NUSADUA
P.SERANGAN
P.MENJANGAN
NGURAHRAI
Gilimanuk
Kuta
Sanur
G.AGUNG
G.BATUR
G.PENULISAN
G.BATUKAU
G.SERAYA
G.PATAS
G.MERBUK
G.KELATAKAN

B A B / *CHAPTER I*

M O N O G R A F I / *M O N O G R A P H Y*

1. Keadaan alam dan iklim

BALI merupakan salah satu pulau dari sekian banyak pulau di Indonesia dan merupakan daerah wisata yang sangat terkenal ke seluruh dunia, terletak diantara 7°45' dan 8°3' Lintang Selatan dan 144°26' dan 115°43' Bujur Timur. Posisi ini berada di daerah katulistiwa antara 23,5 Lintang Utara dan 23,5 Lintang Selatan. Suatu daerah tropis dengan curah hujan rata-rata per tahun tertinggi yakni 3.605 mm khususnya di desa Duda, Selat, Karangasem, dan terendah 963 mm di Sampalan Nusa Penida dan Klungkung.

Di sebelah barat Pulau Bali berbatasan dengan daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Selat Bali. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Pulau Lombok dengan batas Selat Lombok. Di sebelah utara terdapat Laut Jawa dan di sebelah selatan terdapat Samudera Indonesia.

Pulau Bali dengan pulau-pulau kecilnya seperti Nusa Penida, Ceningan dan Lembongan luas 5.632,86 Km².

Sebagian terdiri dari tanah pegunungan yang membentang di tengah-tengah pulau sebagai urat nadi, memanjang dari Barat ke Timur ditandai oleh beberapa puncak bukit.

Terbentang di tengah-tengah Pulau Bali adalah pegunungan yang memanjang dari Barat ke Timur. Sepanjang pegunungan ini berjejerlah Gunung Merbuk (1.386 m), Gunung Patas (1.414 m). Gunung Agung (3.140 m), Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Seraya (1.174 m).

Dataran rendah membentang dari Barat ke Timur di sebelah utara ke selatan pegunungan. Dataran rendah sebelah selatan lebih lebar dari pada dataran rendah sebelah utara dengan di bagian tengah menjorok ke selatan menyambung ke semenanjung bukit. Daerah ini terbelah oleh gunung-gunung dan sungai-sungai. Sungainya memotong pegunungan dan dataran rendah dalam arah yang tegak lurus dengan pantai di mana debit airnya sangat tergantung dan dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim kemarau.

Pada bagian barat dan timur pantai Selatan sungai-sungainya agak pendek yaitu antara 5 - 17 km, sedang pada bagian tengah sungai tersebut lebih panjang yaitu antara 18 - 30 km, yang termasuk melintasi Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar. Sungai-sungai yang memotong pantai bagian utara umumnya sangat pendek dengan debit air yang kecil sekali. Sungai-sungai tersebut punya arti hidrolis, tak dapat digunakan bagi transport dan juga tak dapat dipakai untuk pembangkit tenaga listrik.

Kalau kita lihat dari sudut sosial ekonomi, letak Pulau Bali mutlak strategis, karena berperan sebagai penghubung lalu lintas darat, laut maupun udara antara pulau-pulau di Nusa Tenggara dan Jawa serta Benua Asia dan Australia.

Iklim laut tropis yang dimiliki Bali dipengaruhi angin musim. Di sini terdapat musim kemarau dan musim hujan diselingi oleh musim pancaroba. Suhu dipengaruhi oleh ketinggian tempat, tetapi rata-rata suhu di Bali 28° - 30° celcius. Dataran rendah di bagian selatan lebih lebar bila dibandingkan dengan dataran rendah di sebelah utara. Karena keadaan alam seperti ini besar sekali pengaruh laut terhadap iklim di Bali. Umumnya di Bali bagian selatan turun hujan lebih banyak. Dari bulan Desember sampai Februari angin bertiup dari Barat dan Barat Laut, sedangkan pada bulan Juni sampai Agustus angin bertiup dari Timur dan Tenggara. Pada bulan Maret sampai Mei angin bertiup berubah-ubah arah. Kelembaban udara di Bali berkisar antara 60 - 90% yaitu pada musim hujan bisa mencapai 100% sedangkan pada musim kering mencapai 60%.

Keadaan tanahnya hampir homogen yang sebagian besar terdiri dari tanah alluvial, regosal atau endapan abu vulkano. Tanah ini rata-rata mempunyai derajat keasaman yang agak tinggi. Hanya sebagian kecil di daerah bukit-bukit Nusa Penida; gunung kapur perbatasan Karangasem - Klungkung, semenanjung utara, Gilimanuk terdiri dari tanah kapur.

Setelah gunung Agung meletus dataran-dataran dan pegunungan di kabupaten Karangasem di sebelah utara dan selatan Gunung Agung tertutup oleh endapan lahar dan sekarang merupakan daerah kering berpasir. Tanah-tanah di pegunungan dengan hawa sejuk dan tertimbun oleh endapan-endapan humus yang sangat tebal dan sangat cocok untuk perkebunan sayur-sayuran dan buah-buahan pada daerah-daerah beriklim sejuk. Di beberapa daerah pada kabupaten Karangasem terdapat struktur tanah yang sangat khusus untuk tumbuh-tumbuhan salak dan sejenisnya. Tanahnya terdiri dari lapisan-lapisan tanah liat coklat dengan campuran abu lahar dan campuran humus rendah dan sangat cocok untuk pertanian khususnya padi.

1. Geography

BALI, a worldfamous tourist region is one of the many Indonesian islands. Its geographical position is between 7°45' and 8°3' South-Latitude and 144°26' and 115°43' East-longitude and is situated in the equatorial zone between 23,5 North-latitude and 23,5 South-latitude. The average highest rainfall in this tropical zone is about 3,605 mm, especially in the villages of Duda, Selat and Karangasem, and the lowest in Sampalan Nusa Penida and Klungkung is 963 mm.

The west part of the island of Bali with Bali-Straits borders on the Province of East Java. The East part borders on the island of Lombok with its Lombok-Straits. In the North it border on the Java Sea and in the south on the Indonesian Ocean.

Bali with its surrounding small islands of Penida, Ceningan and Lembongan has a total surface of 5,632,86 Km². It consists partly of mountainous regions situated across the centre of the island from East to West with some mountain-peaks in between.

From West to East in the centre of the island is mount Merbuk (1,386 m), mount Patas (1,414 m), mount Agung (3,140 m), mount Batur (1,717 m) and mount Seraya (1,174 m).

The lowland plain from West to East is situated in the North part to the South of mountanious landscape. The South part is larger than the North part and the centre is interlinked with the Bukit Peninsula in the South. Its contains of many mountains and rivers.

Those rivers flow between the mountains across the lowland plain to Sea. The amount of the water flow depends upon the dry and rainy monsoons.

In the West and East part of the South shore the river length is about 5 to 17 Km, but in the centre part its a little longer, about 18 - 30 Km. Those rivers across the districts of Tabanan, Badung, and Gianyar. The rivers flowing to the North have a small water debit because of their usually small length. Their function is only hydrolic, because they are useless for transportation and for the generating of electricity.

Economically the geographical position of the island of Bali is very strategic. It is the communication centre of land, sea, and airtraffic between the islands of Nusa Tenggara and Java, and also between the continent of Asia and Australia.

The tropical sea weather of Bali depends on the wind monsoon. It depends also on the dry season, the rainy season and the transition period between these two seasons. The temperature depends on the height of the place above sea-level and it is about 28°-30° Celcius.

The lowland plain in the Southern part is wider in comparison with that in the North. Because of these geographical situation the sea has a very big influence on the weather condition in Bali.

In general the North part of Bali has more rainfall. From the month of December till February the wind blows from West to North West, and in the month of June till August from East to South West.

From March till May the wind changes its direction continuously The humidity in Bali is about 60 - 90%. In the rainy season it can reach 100% and during the dry season 60%.

The soil condition is nearly homogen and consists mostly of alluvial soil, regional or volcanic ash sediment. The acid degree of this soil is usually rather high. Only a small part of the mountains region of Nusa Penida; the mountain between Karangasem - Klungkung, the North Peninsula, Gilimanuk consist of lime-soil.

After the eruption of mount Agung the landscape in the district of Karangasem in the North and South part of this mountain is covered with lava sediment and sand. Nowadays the landscape is barren.

The region in the mountains is covered with an extremely thick layer of humus sediments and its cool weather is very suitable for the cultivation of vegetables and fruits.

In the various regions in the district of Karangasem some extraordinary soil structure can be found for the cultivation of the Salak fruit and its variety. Its soil consist of brown clay layers mixed with lava ash and low humus. This soil is very suitable for agriculture, especially rice.

Condition of the soil :

1 Rice field 100,429,50 Ha consists of fields	
a. With semi technical irrigation	*59,523,50 Ha*
b. with simple PU irrigation	*9,743,00 Ha*
c. with simple non-PU irrigation	*30,398,00 Ha*
d. with rain water	*765,00 Ha*

Keadaan tanahnya :

1. Tanah sawah seluas 100.429,50 Ha, dengan perincian :

a. pengairan setengah teknis	59.523,50 Ha
b. pengairan sederhana PU	9.743,00 Ha
c. pengairan sederhana non-PU	30.398,00 Ha
d. tadah hujan	765,00 Ha

2. Tanah kering seluas 157.148,20 Ha, dengan perincian :

a. pekarangan	33.637,67 Ha
b. tegalan	102.291,50 Ha
c. rawa-rawa	257,00 Ha
d. tambak	304,00 Ha
e. kolam/tebat/empang	122,82 Ha
f. tanaman kayu-kayuan	13.433,63 Ha
g. tanah yang sementara belum diusahakan	7.101,58 Ha

3. Hutan negara seluas	125.513,80 Ha
4. Perkebunan seluas	146.140,09 Ha
5. Lain-lain seluas	34.054,41 Ha
Jumlah luas wilayah daerah Pulau Bali	563.286,00 Ha

Jenis tanah litosol yang sangat peka erosi terdapat di bagian barat, membujur dari Desa Penginuman dan Melaya ke timur sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit dan Pempatan. Juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi kurang lebih seperempat Bali.

Jenis tanah regosol yang juga sangat peka erosi terdapat di bagian timur pulau, dari Amlapura sampai Culik. Jenis ini terdapat juga di sepanjang pantai dari Singaraja ke Serikit, di Bubunan, Kekeran, di sekitar Danau-danau Tamblingan, Buyan dan Bratan di sekitar kelompok hutan Gunung Watukaru dan sebagian kecil di pantai selatan Desa Kusamba Sanur, Benoa dan Kuta.

Jenis tanah andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan dan sebagian kelompok hutan Gunung Watukaru. Jenis tanah mediteran yang kurang peka erosi terdapat di Jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya.

Jenis tanah alluvial yang tidak peka terhadap erosi terdapat di dataran Negara, Sumber Klampok, Manggis dan Angantelu.

2. Kependudukan

Jumlah dan pertumbuhan penduduk propinsi Bali berdasarkan beberapa kali sensus sejak tahun 1961 adalah sebagai berikut :

1. Sensus bulan Oktober 1961 menunjukkan jumlah penduduk Bali sebanyak 1.782.529 jiwa. Sedangkan data penduduk yang ada sebelumnya yaitu tahun 1930, sebanyak 1.101,029 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun selama periode 1930 - 1961 adalah kurang lebih 1,57%.
2. Sensus bulan September 1971 menunjukkan jumlah penduduk Bali 2.120.338 jiwa. Dibandingkan dengan angka sensus tahun 1961, rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun adalah 1,77%.
3. Sensus bulan Oktober 1980 menunjukkan jumlah penduduk Bali 2.469.724 jiwa. Dibandingkan dengan angka sensus 1971, rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun adalah 1,69%.

Selama periode 1930-1961 banyak terjadi kejadian penting yang sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk misalnya, peperangan yang memungkinkan tingkat mortalitas tinggi, tingkat kesadaran pendidikan penduduk yang relatif rendah, tingkat kesehatan yang rendah dan sebagainya. Kejadian-kejadian ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah rata-rata 1,57 % setahun.

Pe de berikutnya tahun 1961-1971 kejadian-kejadian semacam ini (khususnya peperangan) kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk, walaupun ditandai oleh G.30 S/PKI tahun 1965. Tingkat pertumbuhan penduduk selama periode ini meningkat kurang lebih 0,20% dibandingkan periode sebelumnya. Periode 1971 sampai dengan 1980 merupakan tonggak usaha penekanan pertumbuhan penduduk mulai dilakukan secara intensif, melalui pengendalian kelahiran. Lihat Tabel I-1.

Dari jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa. Di Pulau Bali terdapat 6.872 jiwa berketurunan asing, terdiri dari 3.514 jiwa laki-laki dan 3.358 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut umumnya mereka berkebangsaan Cina, India, Pakistan, Belanda, Arab dan lain-lain. Hingga kini penduduk di Pulau Bali dapat dikatakan antara jumlah laki-laki dengan jumlah wanita masih berimbang. Lihat Tabel I-2.

3. Mata Pencarian

Dilihat dari letak pulau Bali yang keadaan tanahnya homogen, Bali cocok untuk daerah pertanian, disamping pariwisata, industri kecil dan kerajinan. Hal ini disebabkan keadaan tanah-tanah yang terletak pada daerah dataran rendah dan juga dimungkinkan oleh keadaan iklimnya yang sejuk, rimbun, indah dan kaya budaya.

2. Dry field 157,148,20 Ha consists of

a. yards and gardens	*33,637,67 Ha*
b. dry fields	*102,291,50 Ha*
c. swamps	*257,00 Ha*
d. dams	*304,00 Ha*
e. basin / fish-pond / barrage	*122,82 Ha*
f. plantation	*13,433,63 Ha*
g. still unexploitated land	*7,101,58 Ha*
3. State-owned forest	*125,513,80 Ha*
4. Estates	*146,140,09 Ha*
5. Others	*34,054,41 Ha*

The total ground surface of the island of Bali 563.286,00 Ha. Litosol soil, very sensitive against erosion can be found in the west part, situated from the villages of Penginuman and Melaya to the East till Kalopaksa, Petemon, Ringdikit and Pempatan. Also round-about mount Penyu, mount Pintu, mount Juwet and mount Seraya, all in total about one fourth of Bali.

Regosol soil, also very sensitive against erosion can be found in the East part of the island, from Ampapura till Culik. This soil variety can also be found along the shore from Singaraja to Serikit, in Bubunan, Kekaran, roundabout the lakes of Tamblingan, Buyan and Bratan, roundabout the forest group of mount Watukaru and a small part of the South shore of the village of Kusamba, Sanur, Benoa and Kuta.

Andosol soil, also very sensitive against erosion can be found nearby Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan and a part of the forest group of mount Watukaru.

The medeteran soil which is less sensitive against erosion can be found in the peninsula of Bukit Nusa Penida and its surrounding islands.

Alluvial soil which is not sensitive against erosion can be found in the plain of Negara, Sumber Klampok, Manggis and Angantelu.

2. Population

The amount and population growth in the province of Bali based on several censuses since 1961 is as follows :

1. *The census in October 1961 indicated an amount of 1,782,529 people. The population before 1930 was 1,101,029 people. The yearly average population growth during the period of 1930-1961 is about 1,57%.*
2. *The census in September 1971 indicated an amount of 2,120,338 people. In comparison with the census calculation in 1961, the yearly average population growth is 1,77%.*
3. *The census in October 1980 indicated an amount of 2,469,724 people. In comparison with the census calculation in 1971, the yearly average population growth is 1,69%.*

During the period of 1930-1961 the degree of the population growth had been strongly influenced by many important events, for instance the war which made it possible to reach a high degree of mortality, the relatively low level of people's education system, the low degree of health and others. The results of these events was a relative low degree in population growth of about 1,57% yearly.

The next period of 1961-1971 those kind of events (especially wars) were of less influence in the population growth, even though there had been a communist rebellion G.30.S/PKI in 1965. The degree in the population growth during this period had increased about 20% in comparison with the earlier period. The period between 1971 and 1980 was a startpoint in reducing the population growth by means of birth control. (See Table I-1).

Tabel / *Table I — I*

No.	Kabupaten *District*	Penduduk (*person*) *Population* 1971	1980	Persentase rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun *Yearly average increase of population in percentage*
1.	Jembrana	172.006	204.915	1,95
2.	Tabanan	328.064	342.816	0,48
3.	Badung	400.396	504.300	2,57
4.	Gianyar	271.592	306.129	1,32
5.	Klungkung	139.307	148.746	0,72
6.	Bangli	138.327	161.542	1,72
7.	Karangasem	267.352	314.314	1,80
8.	Buleleng	403.294	486.962	2,09
	Jumlah / *Total*	2.120.338	2.469.724	1,69

Out of the 2,5 million inhabitants of the island of Bali 6,872 persons are of foreign origin and consist of 3,514 men and 3,358 women. From this amount they generally have the Chinese, Indian, Pakistanese, Dutch; Arab and other nationalities.

Sektor pertanian yang merupakan titik berat bagi pembangunan daerah Bali sampai saat ini masih merupakan andalan mata pencaharian penduduk. Pembangunan sektor pertanian bertujuan untuk melanjutkan usaha-usaha swasembada pangan baik untuk memenuhi keperluan rakyat daerah Bali maupun untuk memenuhi keperluan pariwisata serta meningkatkan dan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata.

Perkembangan produksi pertanian tanaman pangan padi sawah, padi gogo, kedele, kacang hijau, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan, dari tahun 1979 sampai dengan 1983 menunjukkan perkembangan yang meningkat, kecuali ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Sedangkan rata-rata produksi per hektar antara intensifikasi umum dan non intensifikasi adalah berkisar 4,6 - 5,6 ton.

Dalam pengaturan tata air kepada para petani, maka pembagian air ditangani oleh organisasi tradisional yang disebut Subak. Subak merupakan organisasi para petani (Krama Subak) yang merupakan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis yang secara historis telah ada sejak dahulu kala. Sampai tahun 1983 jumlah Subak yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali sebanyak 1.193 buah Subak.

Selain pertanian tanaman pangan, peternakan juga mendukung perekonomian Bali. Pada umumnya peternakan di Bali masih bersifat tradisional dengan memanfaatkan limbah pertanian. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar lahan dipergunakan untuk keperluan pertanian tanaman pangan.

Masalah perikanan juga merupakan suatu potensi yang cukup, mengingat luas perairan laut daerah Bali. Luas perairan diperkirakan 9.500 Km^2 dengan potensi perikanan sebesar 77.985 ton per tahun (yang terdiri atas perikanan pelagis dan domersal). Potensi perikanan ini belum termasuk perairan laut bagian selatan Bali, pemanfaatannya hingga 1983 mencapai 65,31%. Apabila diperinci menurut wilayah perairan muka dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

a. Perairan Bali bagian utara luasnya diperkirakan 3.168 Km^2 dengan potensi lebih kurang 3.412,8 ton/tahun dan pemanfaatannya mencapai 44,07%.
b. Perairan Bali barat dengan luasnya 2.982 Km^2 dan potensinya kurang lebih 68.886,2 ton/tahun, sedangkan pemanfaatannya mencapai 63,65%.
c. Perairan Bali timur dengan luasnya 3.350 Km^2 dengan potensi kurang lebih 5,686 ton/tahun dan pemanfaatannya 98,24%.

Tabel / *Table I — 2*

No.	Kabupaten *Dati II*	Luas Wilayah *(Km²)*	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kab Jembrana *Jembrana district*	841,80	98.889	100.849	199.738
2.	Kab Tabanan *Tabanan district*	839,33	170.382	176.670	347.652
3.	Kab Badung *Badung district*	542,50	271.395	267.841	539.236
4.	Kab Gianyar *Gianyar district*	368,00	156.150	156.434	312.584
5.	Kab Klungkung *Klungkung district*	315,00	74.667	77.921	152.588
6.	Kab Bangli *Bangli district*	520,81	83.624	83.219	166.840
7.	Kab Karangasem *Karangasem district*	839,54	160.915	166.005	326.920
8	Kab Buleleng *Buleleng district*	1.365,88	251.261	262.260	513.521
	Jumlah *Total*	5.632,86	1.367.280	1.291.119	2.558.479

Dari potensi yang dimiliki oleh Bali, pariwisata merupakan suatu andalan utama yang sudah berkembang sejak zaman kolonial banyak berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.

Pemerintah dalam periode antara tahun 1970-an sampai dengan 1980-an telah mengadakan perencanaan regional untuk membesarkan keuntungan sosial ekonomi dari pembangunan sektor pariwisata. Perencanaan ini merupakan langkah pendahuluan untuk memulai pengembangan pariwisata, mentakar biaya dan menyerasikan pembangunan regional dalam suatu daerah.

Perkembangan industri pariwisata termasuk sangat menonjol bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Karena bukan hanya dalam bidang perhotelan saja yang sangat menonjol pertumbuhannya di Bali, tapi juga restoran, souvenir shop, biro perjalanan dan angkutan wisata paket-paket wisata lokal, industri kerajinan yang meluas sampai di seluruh pelosok.

Up to now the total ratio of men and women on the island is in balance. (See Table I-2).

3. Living Means

As we look at the island of Bali with its homogen soil, the region will be suitable for the cultivation of vegetables and fruits beside the promotion of tourism, small industry and art. This is because of the condition of the lowplain area. The landscape is beautiful, it has a cool climate and it is also a centre of art.

Agriculture is the main object in the development of Bali and up till now it is the main living means of the Balinese population. The aim of the development of the agriculture sector is to increase and maintain the selfsupport of food for the Balinese people, the tourists and to intensify its system.

From 1979 till 1985 the development of food production like sasa rice, dry field rice, soy bean, small green pea, maize, vegetable and fruit, except cassava, batata and peanut has increased. The averagely production per hectare of public intensification and non intensification is about 4,6 - 5,6 tons.

The water distribution system to the farmers is done by a traditional organization called "Subak". This is a farmer's organization (Krama Subak), a society with prescriptive law which has a socio agricultural, religious and economical characters and already exist in the beginning of history. Up to 1983 the amount of Subaks all over the districts in Bali is 1,193 Subaks.

Beside agriculture, cattle-breeding supports the economy of Bali too. Cattle-breeding in Bali generally still have a traditional character with the utilization of agricultural dumps.

The reason is because a big part of the fields has been used for the agricultural food production.

Fishery is also very important, considering the spacious sea in Bali. It has a surface of about 9,500 Km^2 with a fishery potential of 77,985 tons per year (consisting of pelagis and domersal fishery). The sea in the South part of Bali is not yet included in this fishery potential. Its utilization up to 1983 has reached 65,31%.

The sea surface surrounding Bali can be divided into Zones :

a. Bali waters in the North with a surface of about 3,168 Km^2 and a potential of about 3,412,8 tons/year has been utilized up to 44,07%.
b. Bali waters in the West with a surface of about 2,982 Km^2 and a potential of about 68,886,2 tons/year has been utilized up to 63,65%.
c. Bali waters in the East with a surface of about 3,350 Km^2 and a potential of about 5,686 tons/year has been utilized up to 98,24%.

From all the potentials of Bali tourism is the main back-bone which has developed since the colonial period and support a big deal in the welfare of the Balinese society.

In the period of 1970-1980 the government has made a regional plan to increase social-economic profit from the development of tourism. This plan is the first step in the developing of tourism, finance management and synchronisation of regional development in one area.

In comparison with other regions the development of tourist industry in Bali is conspicuous. Not only the increase of hotels in Bali is obvious but also the increase of restaurants, souvenir shops, travel bureaus, foreign and domestic tourist parcels and the industry of art in the whole island have to be taken into consideration.

Based on data investment in 1981 the amount of souvenir shops is 222, from which 143 shops are located in the district of Badung, 73 shops in Gianyar district and the rest in the districts of Klungkung, Tabanan and Buleleng.

Beside those souvenir shops the Government has established an Art-market located in Sanur, Kuta, Denpasar (Pasar Kumbasari), Sukawati (Gianyar) and the handicraft cooperatives "Karya Asta".

4. Manpower Resources

Generally the population is classified into non-working are people (0-9 years) and working-age people (10 years up). This working-age people will be classified into the working group and non-working group. People belonging to the non-working group are the people who mainly goes to school, who keeps the household and others like retired persons, decrepit persons and so on. Thus people belonging to the working group are those who have reached the age of 10 years and have a job in the society or are still looking for it.

The amount of the working group in 1971 is 732,736 persons, from which 673,886 persons are working and the remaining 58,850 are still looking for a job. (See Table I-3).

Whereas in 1980 the amount of the working group is 964.638 persons, from which 947,383 persons are working and the remaining 17,255 are still looking for a job. (See Table I-4).

A comparison between the census in 1971 and 1980 shows an absolute increase of the population who is working in the agricultural sector, i.e. from 449,465 persons in 1971 to 480,702 persons in 1980, whereas it decreases in percentage, i.e. from 66,70% in 1971 to 50,74% in 1980.

Berdasarkan inventarisasi data tahun 1981, jumlah toko souvenir ada 222 buah. Sebagian besar berada di kabupaten Badung (143 buah) dan Kabupaten Gianyar 73 buah serta sisanya di Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Buleleng.

Disamping toko souvenir pemerintah telah membangun pasar seni yang berlokasi di Sanur, Kuta, Denpasar (Pasar Kumbasari), Sukawati (Gianyar) dan Koperasi Kerajinan Tangan "Karya Asta".

4. Ketenagakerjaan

Pada umumnya penduduk digolongkan atas penduduk bukan usia kerja (0-9) dan penduduk usia kerja (10 tahun ke atas). Penduduk usia kerja dibedakan menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk yang bukan angkatan kerja. Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang bersekolah saja, yang mengurus rumah tangga saja dan yang lainnya seperti pensiunan, jompo, dan sebagainya. Dengan demikian penduduk angkatan kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Lihat Tabel I-3.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 1971 sebanyak 732.736 orang, diantaranya 673.886 orang bekerja dan sisanya 58.850 orang mencari kerja. Sedangkan pada tahun 1980 jumlah angkatan kerja sebanyak 964.638 orang, diantaranya 947.383 orang yang bekerja dan sisanya 17.255 yang mencari kerja.

On the contrary the people who work in the non-agricultural sector has absolutely increased from 224,421 persons in 1971 to 446,681 persons in 1980, i.e. an increase in percentage too from 33,30% in 1971 to 49,26 in 1980. See Table I-5.

It has been found that people belonging to the non-agricultural sector who works in the industrial field, construction works and public services has increased nearly two times in percentage during the period of nine years.

Based on the census results in 1971 and 1980 the projection of manpower resources to be adopted in different profession is feasible.

5. Culture and Traditional Custom

It is known that the Balinese culture has not been influenced by foreign culture. During the past it had been slightly touched not only by colonial culture but also as a result of contacts with international tourism. The strong influence of foreign culture might result in accultourism. As a result of this culture brought by the Netherlands Indies colonial administration since the beginning of the 20th century Bali becomes a resting place and immediately afterwards a tourist region. Many foreigners visit Bali to see its unique culture and traditional custom originating from the Hindu religion.

One of the famous Balinese from of culture is the dance art. Those dances have an educational function so as education in the sense of beauty, good behaviour, heroism and character building. Especially the art served and perceived to the Hindu religious ceremony has been widely developed.

Tabel / *Table I — 3*

PENDUDUK USIA KERJA DAN BUKAN USIA KERJA DI PROPINSI BALI, TAHUN 1971 DAN 1980
WORKING AGE AND NON-WORKING AGE OF POPULATION IN THE PROVINCE OF BALI IN 1971 AND 1980

Tahun *Year*	Bukan Usia Kerja (0-9 th) *Non Working age (0-9 years)*		Usia kerja (10 tahun ke atas) *Working age (10 years up)* Angkatan kerja *Working group*		Bukan angk. kerja *Non working group*		Jumlah *Total*	
	Orang *Person*	%	Orang *Person*	%	Orang *Person*	%	Orang *Person*	%
1971								
Kota / City	61.223	2,89	64.230	3,03	82.594	3,90	146.824	6,93
Pedesaan / Villages	628.373	29,64	668.506	31,53	615.165	29,01	1.283.671	60,54
Kota & Pedesaan City + Villages	689.596	32,53	732.736	34,56	697.759	32,91	1.430.495	67,17
1980								
Kota / City	88.550	3,60	122.033	4,94	152.417	6,17	274.450	11,11
Pedesaan / Villages	[illegible]	23,39	842.605	34,12	686.112	27,78	1.528.717	61,90
Kota & Pedesaan City + Villages	[illegible]	26,90	964.638	39,06	838.529	33,95	1.803.167	73,01

Sumber : Kantor [illegible] Bali
Source : Office of Statistics Bali Province.
Catatan : [illegible]
Remark : % against amount of population

Bila dibandingkan sensus tahun 1971 dengan tahun 1980 penduduk yang bekerja di sektor pertanian secara absolut meningkat dari 449.465 orang pada tahun 1971 menjadi 480.702 pada tahun 1980, sedangkan secara prosentase menurun dari 66,70% pada tahun 1971 menjadi 50,74% pada tahun 1980.

Sebaliknya penduduk yang bekerja pada sektor non pertanian secara mutlak meningkat dari 224.421 orang pada tahun 1971 menjadi 466.681 orang pada tahun 1980, juga secara prosentase meningkat dari tahun 1971 33,30% menjadi 49,26% pada tahun 1980.

Dari sektor non pertanian ternyata penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan industri, bangunan, dan jasa-jasa secara prosentase mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam jangka waktu sembilan tahun.

Berdasarkan hasil sensus pada tahun 1971 dan 1980, selanjutnya dapat diproyeksikan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan. Lihat Tabel I-5.

5. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Kebudayaan Bali terkenal tahan terhadap perubahan zaman dan pengaruh hubungannya dengan budaya luar. Sepanjang zaman selain dari hubungan budaya penjajahan juga oleh karena hubungannya dengan turisme internasional, budaya Bali seringkali mengalami sen-

Tabel / *Table I — 4*

PENDUDUK ANGKATAN KERJA DI PROPINSI BALI TAHUN 1971 DAN 1980
WORKING GROUP OF POPULATION IN THE PROVINCE OF BALI IN 1971 AND 1980

Tahun *Year*			Bekerja *Working for work*	Mencari Kerja *Looking*	Jumlah *Total*
1971	a)	Kota / City	58.686	5.544	64.230
		Pedesaan / Villages	615.200	53.306	668.506
		Kota + Pedesaan City + Villages	673.886	58.850	732.736
1980	b)	Kota / City	121.049	984	122.033
		Pedesaan / Villages	826.334	16.271	842.605
		Kota + Pedesaan City + Villages	947.383	17.255	964.638

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Bali
Catatan : a) Definisi bekerja menggunakan batas minimum 2 hari dalam seminggu.
b) Definisi bekerja menggunakan batas minimum 1 jam dalam seminggu.
Source : Office of Statistics, Bali Province.
Remarks : a) The definition of work utilizes a limit of 2 day's in a week
b) The definition of work utilizes a limit of 1 hour in a week

tuhan di sana-sini. Arus kebudayaan asing yang mungkin akan mengadakan akulturasi. Dan arus kebudayaan asing itu begitu derasnya datang ke Bali sejak pemerintah jajahan Hindia Belanda di sekitar awal abad ke-20 menjadikan Bali sebagai tempat peristirahatan, dan seterusnya sebagai tempat wisata. Berdatanganlah orang asing ke Bali dengan tujuan melihat keunikan kebudayaan Bali, adat istiadat yang dipancarkan agama Hindu.

Salah satu bentuk budaya yang terkenal dari Bali adalah seni tari. Melalui seni tari dengan segalanya dapat diterapkan; pendidikan rasa keindahan, sopan santun, kepahlawanan dan penalaran. Khususnya melalui penyajian dan penghayatan melaksanakan upacara agama Hindu sampai saat ini cukup berkembang.

Di Bali terdapat beberapa jenis tari yang mempunyai fungsi tertentu dalam upacara agama, misalnya :

Pendet; berfungsi sebagai tari penyambutan yang ditujukan kepada bhatara bhatari yang turun ke marcapada (dunia) dalam suatu upacara atau penyembrama (menerima) kedatangannya dari Melasti (menyucikan pralingga).

Rejang; berfungsi sebagai simbol bidadari yang turun ke dunia menuntun bhatara waktu melasti atau tedun ke paselang (turun ke tempat upacara), oleh karena itu penari-penari terdiri dari gadis-gadis yang belum kawin (Putra, tanpa tahun : 9). Di Bali Utara desa Bungkalan, rejang renteng (bergandengan dengan benang) berfungsi sebagai tari penyambutan terhadap dewi "Sri" sebagai pernyataan bersyukur karena berhasilnya panen padi.

Baris gede; dengan segala variasinya, yakni baris dadap, baris presi, baris tumbak, baris jojor, baris bandarangan, baris panah, baris jangkang dan sebagainya pada umumnya mempunyai fungsi yang sama dengan pendet. Hanya baris Tekok Jago (baris bedug) terdapat adanya fungsi sebagai pengantar roh menuju ke Indraloka (sorga), misalnya dalam upacara "ngaben". (pembakaran mayat).

Sanghyang; yang dianggap sebagai tari yang berakar pada kebudayaan pra-Hindu dengan berbagai jenisnya mula-mula berfungsi sebagai media roh suci turun ke dunia dalam keadaan kerauhan (intrance) kemudian berperan sebagai penolak penyakit yang sedang berkecamuk.

Wayang (kulit) lemah; pada pokoknya wayang lemah berfungsi sebagai penyambung alam sekala dengan alam niskala pada waktu diadakan upacara untuk memohon kehadiran Bhatara, Maharesi, dan leluhur yang sudah di alam gaib untuk memberikan restu dan petunjuk dalam rangkaian upacara dimaksud (Putra, tanpa tahun; 12-13).

Ada lagi beberapa tarian yang menurut paham setempat dianggap sebagai tari wali, misalnya : tari Sraman di Kabupaten Karangasem, tari Calon arang di Balyu (Tabanan), tari Legong Tapel di Ketewel (Gianyar).

Tari sebagai perwujudan ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Perkembangan tari di Bali dari zaman primitif (pra-Hindu) dapat digambarkan sebagai berikut.

Tari tertua yang sudah dijumpai pada zaman pra-Hindu berbentuk tari Sanghyang. Tari ini masih didapati di daerah khususnya di pegunungan, erat hubungannya antara Jawa dan Bali. Sejak abad ke-10 dan lebih-lebih setelah runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan unsur-unsur kebudayaan Jawa termasuk tariannya luluh menyatu dengan kebudayaan Bali yang meliputi karawitan.

Seperti yang diuraikan tadi, perkembangan tari mengikuti pula dinamika masyarakat. Sifat masyarakat yang dinamis menghendaki adanya perubahan atau kemajuan di segala bidang. Taripun tidak ketinggalan mengalami inovasi/pembaharuan. Pembaharuan itu sebagian besar bertolak dari materi tradisional dan sebagian lagi mencari unsur-unsur baru mengikuti koreografi tari universal.

Seni Karawitan

Karawitan adalah seni suara tradisi Bali (dan juga Jawa) yang baik vokal maupun instrumental yang berlaras slendro atau dengan kata lain yang nondiatonik. Karena nada-nada yang diperlukan pada umumnya terdiri dari lima buah, maka musik tradisi Indonesia khususnya di Bali disebut pentatonik atau pancanada. Instrumen-instrumen yang menghasilkan nada-nada.

Hubungan antara seni tari dan karawitan khususnya gamelan sangat erat, boleh dikatakan hampir semua jenis tari memerlukan gamelan sebagai pengiringnya.

Sebagai alat bunyi-bunyian, gamelan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Bali, bahkan hampir tak ada suatu upacara keagamaan yang dianggap sempurna tanpa ikut sertanya gamelan dan tari tertentu.

Jika diamati melalui upacara keagamaan dan adat Bali, gamelan dan tembang disamping mempunyai nilai-nilai kultural religius dapat pula berfungsi sebagai penggugah respon fisik masyarakat.

In Bali some dance art has a special function in a religious ceremony like for instance :

Pendet : to welcome the gods and goddesses (bhatara bhatari) who come down to earth (marcapada) or to receive their arrival from Melasti (to sanctify the "pralingga").

Rejang : to symbolize the fairy coming down to earth guiding the god (bhatara) during melasti or coming down to the place of the ceremony (tedun to paselang), that's the reason why it has to be danced by unmarried girls (Putra, without the year : 9).

In the villages of Bungkalan in North-Bali, the rejang renteng (coupled together with thread) dance is a welcome dance dedicated to the goddess "Sri" to thank her for the successful rice harvest.

Baris gede : with all its variation like baris dadap, baris presi, baris tumbak, baris jojor, baris bandarangan, baris panah, baris jangkang and others generally has the same function as the pendet dance. Only the baris Tekok Jago (or baris bedug) has a special function as guidance of the human spirit ot enter Indraloka (paradise), for instance in the "ngaben" ceremony (corpse burning).

Tabel / *Table I — 5*

PENDUDUK YANG BEKERJA DIPERINCI MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, TAHUN 1971 DAN 1980

WORKING PEOPLE CLASSIFIED IN DIFFERENT PROFESSION IN 1971 AND 1980

Lapangan Pekerjaan *Profession*	1971		1980	
	Jumlah orang *Total persons*	%	Jumlah orang *Total persons*	%
1. Pertanian / *Agriculture*	449.465	66,70	480,702	50,71
Non Pertanian / *Non Agriculture*	224.421	33,20	466,681	49,26
2. Penggalian / *Soil digging*	8.193	1,20	12.695	1,34
3. Industri / *Industry*	38.949	5,78	93,222	9,84
4. Listrik & air minum *Electricity and drink water*	433	0,07	853	0,09
5. Konstruksi/bangunan *Building construction*	16.781	2,49	45,664	4,82
6. Perdagangan, Hotel dan Rumah makan *Trade, hotel and restaurant*	70,834	10,51	137.560	14,52
7. Pengangkutan dan Komunikasi *Transportation and Communication*	8.053	1,20	20,937	2,21
8. Perbankan dan lembaga keuangan *Banking and financing*	1.112	0,16	5.116	0,54
9. Pemerintah dan jasa-jasa *Govt. administration and public services*	55.824	8,28	145.220	15,33
10. Tidak jelas / *unclear*	24.337	3,61	5 414	0,57
Jumlah / *Total*	673.886	100,00	947.383	100,00

Sumber : *Kantor Statistik Propinsi Bali*

Source : Office of Statistics, Bali Province.

Catatan Pertanian, terdiri atas tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan

Remarks : Agriculture consist of farming, plantation, cattle-breeding and fishery.

Sanghyang : it has been acknowledged as a dance originated from the pre-Hindu culture with all its variations. In the beginning it has functioned as a media of the Holy Ghost who comes to earth intrance (kerauhan) condition but later on as a rejector of epidemic deseases.

Wayang (kulit) lemah : principally it has the function as a link between the concrete (sekala) and the abstract worlds (alam niskala) in a ceremony to ask the presence of Bathara, Maharesi and ancestors from the world of spirits to grant blessing and guidance during the execution of the ceremony (Putra without the years : 12-13).

Some more dances in the region has been believed as a dance of the Saint (wali) like the Sraman dance in the district of Larangasam, the Calon Arang dance in Balyu (Tabanan), the Legong Tapel dance in Ketewel (Gianyar).

The dance is an expression of the human soul by means of graceful rythmical movements. The development of the dance in Bali since ancient time (pre-Hindu) can be explained as follows.

The oldest dance dated from the pre-Hindu age has the form of the Sanghyang dance. This dance still exist especially in the mountainous region. It has a very close relationship with the javanese dance. Since the 10th century and soon after the fall of the Majapahit Kingdom the Javanese culture including its dances has integrated with the Balinese culture in the field of karawitan art.

As mentioned before the development of the dance has also followed the dynamic society. The dynamic character of the society demands changes and development in all kind of fields. The dances too are not left behind in the

Di Bali boleh dikatakan tidak ada instrumen gamelan milik individual, atau permainan yang dilakukan secara solo. Permainan selalu dilakukan secara bersama-sama, sehingga rasa solidaritas dan toleransi antar anggota masyarakat tetap terpupuk dengan baik, yang berarti menguatkan norma-norma kehidupan masyarakat.

Seni Rupa

Seni rupa Bali merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali yang sudah diwarisi sejak berabad-abad yang lampau. Seni rupa Bali pada pokoknya dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu seni patung, seni lukis, arsitektur dan seni kerajinan.

Seni rupa dijumpai pada zaman pra-Hindu menurut catatan yang terdapat pada Museum Purbakala Bedulu, Gianyar meliputi jenis-jenis peralatan dari batu zaman Paleotithicicum, alat-alat dari tulang dan tanduk (zaman Mesolithicum), alat-alat dari batu yang sudah halus zaman Neolithicum, sarcophag (zaman Megalithicum), berjenis-jenis arca gelang dan lampu dari zaman Perunggu dan Besi.

Meski terjadi revolusi fisik antara tahun 1945-1950, perkembangan seni rupa Bali berjalan terus. Kini dengan dimulainya orde pembangunan, seni rupa Bali nampak makin cerah dan bahkan ada dalam keadaan yang dinamakan "Stade Study" (masa study).

Dengan keadaan masa study ini, sentra-sentra seni rupa yang telah ada berkembang pesat.

Disamping pusat-pusat yang tumbuh di kota maupun di desa Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah memperhatikan pelestarian seni rupa dengan memberi pembinaan dan mengadakan Pesta Kesenian Bali setiap tahun. Lembaga-lembaga seperti Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI), Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia (SMSRI), Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Program Studi Seni Rupa Indonesia (PSSR), Departemen Perindustrian, Taman Budaya (Arts Centre) merupakan lembaga-lembaga yang ikut bertanggung jawab atas pengembangan seni rupa.

Arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan merupakan wadah kehidupan manusia di alam lingkungannya. Kecenderungan manusia, keadaan alam dan adat kebiasaan setempat yang dilatarbelakangi norma-norma agama mengeras ke dalam bentuk-bentuk arsitektur dan wujud tingkah laku budaya yang diwadahinya.

Demikianlah Bali membedakan diri dengan tempat-tempat lain di bumi. Arsitektur tradisional Bali sebagai wujud budaya dalam lingkungan binaan, dijiwai oleh falsafah perwujudannya dan dibentuk oleh fungsinya.

Falsafah perwujudan arsitektur tradisional Bali menjadikannya suatu lingkungan binaan yang serasi dan selaras dengan manusia, alam dan Tuhannya. Tri Hita Kharana, tiga kutub yang menjadikannya suatu kehidupan di bumi; manusia, alam dan arsitektur yang diterima sebagai suatu kehidupan setelah melalui suatu proses ritual dan kelahirannya.

Arsitektur menjaga keseimbangannva. Nawa Sanga, sembilan lintasan yang masing-masing berkedudukan pada arah tertentu; dijiwai, dihuni, diwarnai dan disenjatai oleh kekuatan-kekuatan tertentu dengan penata ruang dan waktu masing-masing dalam wujud arsitektur. Panca Maha Bhuta, tiga unsur yang membentuk suatu kehidupan manusia, alam dan lingkungannya yang harmonis karena unsur pembentukannya yang sama.

Bentuk-bentuk bangunan lahir dari fungsi yang diembannya dan bentuk penampilannya jelas diketahui fungsi bangunanya. **Meru** untuk tempat pemujaan, **bale meten** untuk tempat tinggal, **wantilan** untuk tempat pertemuan. Demikian pula bangunan-bangunan yang lain masing-masing identitas yang disandangnya menginformasikan fungsinya.

Adat-istiadat

Pandangan hidup masyarakat Bali yang sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh kebudayaan Hindu, mengandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta pikiran-pikiran yang mendalam mengenai wujud kehidupan yang dinilai baik. Pandangan hidup demikian itu merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, diyakini kebenarannya dan karenanya membangkitkan tekad warga masyarakat untuk mewujudkannya.

Bali memiliki kekhasan tersendiri dalam adat istiadat. Dan bermacam-macam upacara adat dan keagamaan yang sampai saat ini masih secara ketat dilaksanakan.

Sistem perkawinan masyarakat Bali pada garis besarnya memiliki tahap-tahap proses upacara sebagai berikut :

1. Memadik/ngidih (meminang) : bentuk perkawinan yang didahului oleh adanya peminangan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak calon suami (purusa) kepada keluarga dari calon pihak istri, dengan membawa "basan pupur" beserta sirih pinang dilengkapi dengan "paweweh" (sejumlah uang dan kejujuran).

experiences of innovation/renovation. A big deal of this renovation is departing from traditional elements and another part is looking for new elements following the choreography of an international dance.

Karawitan Art

Karawitan is a traditional Balinese (and also Javanese) sound art vocally and instrumentally based on the "slendro" gamut, i.e. a nondiatonic audio system. Whereas generally the required sound consist of five different tones, so the traditional Indonesian music in particular is called pentatonic or pancanada (five tones) : all the music instruments have five main tones.

The dance and karawitan arts have an extremely close tie, so nearly all kind of dances has to be accompained with gamelan music. The gamelan as a music instrument cannot be separated from the life of the Balinese society. None of the religious ceremonies will be perfect without the presence of the gamelan and a certain dance art.

If we observe the gamelan music and poetry singing in a religious and Balinese custom ceremony, we will come to the conclusion that beside cultural religious values it also can be utilized to bring out the physical response of the society.

Individual-owned gamelan instruments in Bali is hardly to b found, Solo gamelan playing does not exist. The gamelan instruments will always be played together so that the solidarity and tolerance feeling between members of the society will be consolidated continuously, which means a strengthening of the life norms of the society.

Fine Arts

The Balinese fine art is an important part of the social life in Bali. It has been inherited since centuries in the part. The plastic art in Bali can be devided in four varieties, i.e. the art of sculpture, painting, architecture and handicrafts.

Fine art has been found in the pre-Hindu age and in accordance with the records in the archaeological museum (musium purbakala) of Bedulu in Gianyar. It consist of varieties of tools from the Paleolithicum age, tools made from bones and horns (Mesolithicum age), refined stone-tools from the Neolithicum age, sarcophagus (Megalithicum age), many kinds of arcas, bracelets and lamps from the Copper and Iron ages.

In spite of the physical revolution between 1945-1950 the development of the fine art in Bali still continues. Nowadays, starting with the Development Order, this art seems to have a brilliant future. More than that it is in a condition called "State Study". During this state study period the fine art centre has made big progress.

Beside the growth of these centres in the cities and villages the Provincial Administration of the island of Bali takes care of its conservation with management guidance and yearly Balinese art festivals. Institutions like the Academy of Indonesian Dance Art (Akademi Seni Tari Indonesia - ASTI), the Higher Grade School of Indonesian Fine Art (Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia - SMSRI), the Higher Grade School of Indonesian Karawitan (Sekolah Menengah Karawitan Indonesia - SMKI), the Study Programme of Indonesian Fine Art (Program Studi Seni Rupa Indonesia - PSSR), the Ministry of Industry, the Arts centre (Taman Budaya) are responsible for the development of fine art.

Architecture as a part of arts is a forum to accomodate the coexistence of the people in their circumferences. The human inclination, the nature condition and the local traditional habits with a backdrop of religious norms are concentrated together and have formed the architecture in this forum.

So this makes Bali different from any other island in the world. The Balinese traditional architecture as on art form of renovation has been inspired by its form of phylosophy and is formed by its function.

The phylosophy in the forming of Balinese traditional architecture has established an inspiration environment in harmony and in line with the people, the nature and their God. Tri Hita Kharana, the three poles as the creators of life on earth; the human being, the nature and architecture which have been accepted as life after a ritual and birth process.

Architecture keeps the harmony. Nawa Sanga, the nine orbits, each of them placed in certain direction; inspired, watched, spiced and armed by certain powers with space lay-outs and time arrangements in the form of architecture. Panca Maha Butha, the three elements who established human life, the nature and its circumference in harmony because of their same origin.

The structure of the building is inspired by its architectural function and the form is in line with the functional needs. ***Meru*** *is the room for worship,* ***bale meten*** *is the living room,* ***wantilan*** *is the conference room. So all other buildings will be identified in line with their function.*

Traditional Customs

The phylosophy of life of the Balinese society has been strongly influenced and inspired by the Hindu culture. It implies the basic concept of their life aspiration and their opinion about a good mode of living. This phylosophy

2. **Mejangkepan/Kepekardin : bentuk perkawinan yang inisiatifnya timbul dari pihak orang tua kedua calon pasangan suami istri, merekalah yang sebenarnya yang menghendaki** supaya perkawinan **itu berlangsung.**
3. **Merangkat/Ngelayat/Ngerorod** : bentuk perkawinan yang diselanggarakan atas inisiatif sendiri yang bebas oleh kedua calon suami-istri atas dasar cinta dan dengan cara melarikan diri bersama-sama.
4. Perkawinan Nyeburin : bentuk perkawinan dimana calon suami berkedudukan sebagai wanita sedangkan calon istri berkedudukan sebagai pria, sedangkan upacara perkawinan itu diselenggarakan oleh pihak keluarga si istri di rumahnya sendiri.

Suatu perkawinan menurut hukum Hindu adalah syah kalau dilakukan menurut ketentuan hukum agama. Bukan pada tata administrasinya, tetapi untuk kepastian hukum, administrasi itu diperlukan sebagai alat pembuktian yang kuat. Adapun ketentuan hukum agama ialah dengan melaksanakan upacara "mesakapan" yang pada umumnya dilakukan dalam dua fase yakni :

Fase pertama : disebut "mekale-kale" yang dilaksanakan di halaman rumah (dinatar) yaitu pada daun tiga (kira-kira jam 09.00 - 10.00) dengan bebanten (upacara).

Fase kedua : "natab bebanten beduwur" yang sering disebut "me-Widi Widhana" yang diselenggarakan/diselesaikan oleh seorang Pendeta (Pedanda). Upacara ini adalah merupakan upacara persaksian terhadap Idang Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), adapun tempatnya di dalam rumah di atas balai, karena itu disebut "natab beduwur".

Kalau kita membicarakan soal perkawinan kita juga membicarakan soal anak, karena tujuan utama dari pada perkwainan menurut hukum Hindu atau menurut agama Hindu, adalah untuk memperoleh anak (putra) yang dapat menyelamatkan keluarganya dari penderitaan Neraka yang disebut Neraka PUT.

Dari istilah neraka PUT inilah lahir putra, yang artinya menyelamatkan arwah orang-orang tuanya dari neraka PUT. Jadi perkawinan ini bersifat religius. Perkawinan tidak menggariskan berapa jumlah anak, tetapi yang jelas, anak yang lahir dari perkawinan itu dibedakan antara : anak aurasa, anak yang lahir karena birahi, anak levirat (anak perdana).

Anak aurasa ialah anak yang menjadi tujuan dari perkawinan, biasa juga disebut dengan anak kesetraya. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang lahir karena birahi ialah anak yang lahir karena tidak lagi bersandar pada hukum kewajiban yang diharapkan menurut hukum agama, melainkan karena hubungan yang tak dapat dielakkan yang timbul karena nafsu. Jelasnya adanya anak lebih dari satu akibat dari perkawinan yang secara religius dan anak itu mempunyai status dan hubungan yang berdiri sendiri, disebut anak yang lahir karena birahi. Anak levirat menurut hukum Hindu adalah anak dari suami semula, bukan sebagai anak si bapak yang mengawininya. Ini lebih dikenal dengan nama "putra pradana" yakni bentuk ekstrim dari sistem perkawinan nyeburin, yang hanya dilakukan oleh seseorang karena keperluan yang dibenarkan oleh agama.

Upacara agama termasuk sangat kaya dengan mitos-mitos seperti halnya :

a. Upacara megedong-gedongan : upacara ini dilakukan setelah kehamilan 5 bulan keatas dengan tujuan untuk memohon keselamatan si jabang bayi di dalam kandungannya.
b. Upacara bayi lahir : upacara ini dilakukan setelah bayi lahir termasuk upacara penanaman ari-ari. Setelah ari-ari dibersihkan dimasukkan ke dalam sebuah kelapa yang dibelah dua (airnya dibuang).
c. Upacara kepus peser (putus tali puser) : upacara ini dilakukan jika tali puser bayi telah putus dan menurut kepercayaan Hindu mulai saat ini si bayi diasuh oleh "Sanghyang Kumara" dan untuk beliau dibuatkan sebuah tempat tidur si bayi yang disebut "pelangkiran" (kemara).
d. Upacara satu bulan tujuh hari (42 hari) : upacara ini dilakukan setelah si bayi berumur 42 hari dengan tujuan agar si bayi bersama-sama empat bersih dari pengaruh-pengaruh kekuatan-kekuatan buruk yang menyertai si bayi pada waktu lahirnya.
e. Upacara tiga bulan (105 hari) : upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar jiwa/atma yang bersangkutan benar-benar diberi kesempatan untuk menjelma kembali, menempati stula-sarira (badan kasarnya). Pada kesempatan ini si bayi diberi nama dan diadakan banten pejati (melapor ke Bale Agung).
f. Upacara satu otonan (6 bulan) : upacara ini dilakukan tepat si bayi berumur 6 bulan (210 hari) dengan tujuan untuk membersihkan "siwadwara" (pintu masuk untuk menerima pelajaran) si bayi itu diwujudkan dengan memotong rambut (digunduli) dan mohon waranugraha kehadapan ibu pertiwi (turun tanah) menginjak tanah.

is a crystalisation of the cultural values of the society, and is convinced of its correctness; so it arouses the will-power of the society to realize it.

Bali has a unique traditional custom and a large variety of religious and traditional ceremonies which are still carried out.

Principally the wedding system in the Balinese society has a variety of processes as follows :

1 Memadik/ngidih (to propose to a girl) : the wedding system in which the parents of the groom (purusa) in advance make the proposal to the girl's parents, and submit the "basan pupur" with sirih and areca-palm included the "paweweh" (a certain amount of money and a symbol of reliability).

2 Mejangkepan/Kepekardin : the wedding system in which the initiative has been made by both parents of bride and the groom, so the wedding is the wish of the parents.

3 Merangkat/Ngelayat/Ngerorod : the wedding system in which both participants have made their own free choice based on their love for each other and run away from their parent's home.

4 Nyeburin wedding : in this system the groom candidate has the function as the woman and the bride candidate as the man, whereas the wedding ceremony will be hold by the parents of the bride in their own home.

In accordance with the Hindu law a wedding is legal if it has been carried out in line with the definition of the religious law. The administration system is important and necessary to prove and to confirm the conclusion or positivness of the law. The definition of the religious law is to carry out the "meskapan" ceremony which generally will be accomplished in two phases:

First Phase : the "mekale-kale" has to be executed in the house-garden (dinatar) during the "daun tiga" (three leaves) time, i.e. 09.00 - 10.00 hour) with the "bebanten" (ceremony).

Second Phase : the "natab bebanten beduwur" often called "me-Widi-Widhana" will be carried out by the Pedanda (a Hindu priest of the highest caste). This ceremony is a testimonial ceremony dedicated to Idang Sanghyang Widhi Wasa (the One God) which takes place inside of the house above the "balai" (building), so in Bali they call it "natab beduwur".

If we begin to discuss wedding problems, we too have to discuss children problems, since the main aim of a wedding in accordance with the Hindu law or Hindu religion is to get children (putra) who can safeguard their families' from sufferings in the Hell, which is called the "Neraka Put".

From the "Neraka Put" a child is born, which means to safeguard his or her parent's souls from Hell. So the wedding has a religious character. The wedding will not limit the amount of children to be born, but it is clear, that a child born as a result of a wedding will be classified as : "anak aurasa", a child born as a result of love and "anak levirat" (the first child).

The anak aurasa is a child who is born in accordance with the aim of a marriage and is usually called "anak kesetraya". Whereas a child who is born because of love is a child who is born not as a result of legal law in accordance with the religious law, but as a result of adultery because of love desire. This child has an extra-ordinary independent status in the society, because of its birth. In accordance with the Hindu law and "anak levirat" is a child from the first husband and not from the actual husband. So this child is more known as "putra perdana" i.e. an extreem from of the "nyeburin" wedding system, which only have to be done because of the needs which has been justified by the religion.

The ritual ceremonies consist of many myths :

a The Megedong-gedongan ceremony : a ceremony which will be hold after 5 months of pregnancy or more with the aim to pray for the safety of the baby in the womb.

b The child birth ceremony : this ceremony will be hold after the birth of the child including the ceremony of burying the placenta. After the placenta has been cleaned, it will be put inside a splitted coconuts (fruit-water removed).

c The kepus peser (breaking off the navel-string) : This ceremony will be done after the nevel-string of the baby has been broken off and in accordance with the Hindu belief the child will then be guided by "Sanghyang Kumara" and for his convenience a baby bed called "pelangkiran" or kemara will be constructed.

d The one month and seven days ceremony (42 days) : this ceremony will be done after the baby has reached the age of 42 days with the aim to clean the baby from all evils during its birth.

e The three months (105 days) ceremony : this ceremony will be held with the aim to beg the One God for a perfect reincarnation of the soul involved to move into the "stula-sarira" (the human body). On this occasion the baby gets his name and the "banten pejati" (report to the Bale Agung) will be executed.

f The one otonan (6 month) ceremony : this ceremony will be held exactly after the baby has reached the age of 6 month (210 days) with the aim to clean the "siwadwara" (the entrance gate to receive knowledge) for which the baby's hair will be totally cut off and to beg the Ibu Pertiwi (mother earth) for the "waranugraha" to step down on earth.

g. Upacara tumbuh gigi (ngempugin) : upacara ini dilakukan pada waktu si bayi tumbuh giginya untuk pertama kali dengan tujuan memohon kehadapan Tuhan Yang Mahaesa dalam segala manifestasinya, agar gigi si anak dapat tumbuh dengan baik, rata, putih, kuat, tidak jamuran, tidak dimakan ulat, dan sebagainya.
h. Upacara lepas gigi (makepus) : upacara ini dilakukan pada waktu si bayi lepas giginya (lepas untuk pertama kalinya) dan sejak ini si anak tidak disebut "Rare" (bayi) lagi melainkan dia sudah mulai mempersiapkan diri untuk menginjak "alam dewasa/alam belajar)."
i. Upacara meningkat dewasa (mungguh deha/teruna) : upacara ini dilakukan setelah si anak meningkat dewasa dengan bertujuan untuk memohon bimbingan kehadapan Tuhan Yang Mahaesa dengan segala manifestasinya, di dalam menghadapi kehidupan baru sebagai orang dewasa.
j. Upacara memotong gigi (metatah) : upacara ini dilakukan setelah si anak meningkat dewasa dengan memotong atau mengasah 4 buah gigi serinya dan 2 buah taring atas sehingga jumlah semuanya 6 buah, dengan maksud memotong menghilangkan 6 musuh di dalam badan yang disebut Sadripu.

Kekerabatan

Sistem kekerabatan di Bali mempergunakan sistem genealogis patrilineal atas dasar pemujaan terhadap roh-roh leluhur/pitra puja. Kekerabatan lazim dibedakan atas 2 jenis yakni :
a. Kekerabatan sekelompok (sesuku)
b. Kekerabatan sedarah

Yang dimaksud dengan sistem kekerabatan sekelompok ialah kekerabatan yang mendasarkan ketunggalan kelompok atau suku. Hubungan antara kekerabatan mereka ditimbulkan oleh karena mereka bersama-sama menjadi anggota dari kelompok yang sama. Di dalam kelompok kekerabatan ini terdapat solidaritas yang kuat, baik dalam kehormatan atau kehinaan maupun dalam pembalasan dendam. Di Bali kita jumpai dalam bentuk Banjar-banjar.

Yang dimaksud dengan kerabat sedarah ialah kekerabatan yang berdasarkan ketunggalan darah. Ketunggalan darah berarti bahwa di dalam tubuh mereka itu terdapat darah yang sama karena sama-sama berasal dari seorang bapak leluhur dengan tidak memperdulikan apakah bapak leluhur itu mulia atau hina. Karena didasarkan kepada ketunggalan darah, maka haruslah diketahui dengan jelas siapa-siapa orangnya yang menghubungkan darah itu menjadi satu kelompok kekerabatan seperti halnya dengan kekerabatan sekelompok. Di sini tidak menimbulkan solidaritas kolektif di antara orang-orang yang berketunggalan darah itu, melainkan sebaliknya menimbulkan solidaritas perorangan.

Bali dan juga daerah-daerah di Indonesia dimana terdapat hukum kebapaan (Patrilinial), untuk suku bangsa Bali yang beragama Hindu lebih dikenal dengan hukum **hukum purada** (laki). Untuk menunjukkan pengertian ketunggalan kekerabatan sedarah (Patrilinial), maka di Bali didapati istilah "madadiya bareng" atau **mapemerajan kawitan bareng** artinya mempunyai ketunggalan bapak leluhur. Bapak leluhur disebut "bhatara kawitan" dengan tempat pemujaannya disebut "Sanggah Kemulan" atau "Kemulan Taksu" dan di Bali dibuatkan **Pelinggih Rong Tiga.**

Disamping kekerabatan sekelompok dan kekerabatan sedarah di Bali kita dapati lagi kekerabatan sepenyusungan. Artinya kekerabatan yang timbul karena mempunyai satu penyusungan. Hal ini terjadi biasanya dari salah satu Pura, dimana pada Pura itu terdapat tatangunan berupa tapel (topeng). Barong atau Rangda atau tapel lainnya yang bahannya didapat dari satu Pura. Semua tapel yang asalnya dari Pura tersebut dianggap sebagai "bersaudara" sehingga penyusungan menganggap dirinya merupakan satu ikatan batin, walaupun mereka itu tidak sekelompok. Mereka merupakan kekerabatan sepenyusungan.

Penutur bahasa Bali adalah masyarakat Bali dengan perkiraan jumlah tiga juta orang. Mereka berdiam terutama di wilayah Propinsi Bali. Di beberapa wilayah di Indonesia di luar Propinsi Bali penutur bahasa Bali terdapat di Lombok Barat di beberapa tempat transmigrasi orang Bali di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa dan Timor Timur.

Masyarakat Bali sebagai penutur bahasa Bali terutama yang berada di wilayah Bali mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mereka bergaul, bukan hanya dengan etnik-etnik yang membentuk bangsa Indonesia, tetapi mereka juga bergaul dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Keadaan demikian dialami oleh masyarakat Bali khususnya di daerah-daerah wisata.

Ragam bahasa Bali dapat dilhat dari sudut geografisnya dan sudut sosial. Ragam bahasa Bali dari sudut geografis adalah bahasa Bali Dataran dipergunakan oleh orang yang bertempat tinggal di dataran rendah sedangkan bahasa Mula digunakan oleh orang yang bertempat tinggal di daerah pegunungan.

g The teeth-growth (ngempugin) ceremony : this ceremony will be held if the baby gets its first teeth with the aim to beg the One God in all His manifestations, so that the child's teeth can grow perfectly, equally, white coloured, strong, free from fungus, free from worms and so on.
h The loosing teeth (makepus) ceremony : this ceremony will be held if for the first time the baby looses one of its tooth and from that event on the child will not be called "Rare" (baby) anymore because it begins to prepare itself to step into the "alam dewasa/alam belajar" (the world of adults/the world of study).
i The grown-up (mungguh deha/teruna) ceremony : this ceremony will be hold after the child has grown up with the aim to beg the One God with all His manifestations for guidance in facing a new life as an adult person.
j The tooth cutting (metatah) ceremony : this ceremony will be held after the child has grown up. Four of the cutting-tooth and two of the upper canine-tooth will be cut off or grinded. The grinding of these six tooth has the aim to liquidate the 6 enemies in the human body. It is called the "Sad ripu".

Kinship

The kinship system in Bali utilizes the genealogical patrilineal system based on worship dedicated to the souls of their ancestors/pitra puja.

Generally the kinship will be devided in two classifications :
a) the group kinship (one tribe)
b) the family kinship

The group kinship system is a kinship based on a group or tribe unity. The relationship between the members of this kinship emerges because all of them belong to the same group or the same trib. In this group kinship the solidarity of the members in sense of honour, in significance as well as in taking revenge is very strong.

The family kinship system is a kinship based on blood unity. This blood unity means that all the member's bodies contain the same blood, because all of them have the ancestor whether this ancestor is honourable or insignificance. Because of this system they have to know in advance the origin of the persons involved in their blood relationship with this kinship. In this system there will be no sense of collective solidarity but on the contrary the sense of individual solidarity emerges.

*Bali and also the regions in Indonesia have a patrilinial law but in the tribes of the Balinese population with their Hindu religion this law is known as **hukum purada** (masculine law). The meaning of a family kinship unity (Patrilinial) in Bali can be shown from the Balinese term "madadiya bareng" or **mapemerajan kawitan bareng** which means : have an ancestor unity. The ancestor is called "bhatara kawitan" and their worship place is called "Sanggah Kemulan" or "Kemulan Taksu" and for this the Balinese makes the **Pelinggih Rong Tiga.***

Beside the group and family kinship there exists in Bali the "sepenyusungan" (association) kinship. This kinship emerges from one penyusungan. Normally it arises from one of the Pura's which owns a "tatangunan" (ritual accesories) in the form of a "tapel" (mask), "Barong" or "Rangda" or any other masks made of materials from the same Pura. All the masks from the same Pura have been assumed to be "brothers" so that the association (penyusungan) assumes itself as to have one common mind though the fact that their members dont belong to the same group. So those people form a sepenyusungan kinship.

The Balinese language speaking people is the Balinese society in the province of Bali with an amount of about three million persons. Outside the province they can be found in several parts of the Indonesian Archipelago like in West Lombok, in Balinese transmigration areas such as in the islands of Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa and the province of East Timor.

The Balinese language speaking society especially in the province of Bali has made great progress in the use of the mother language. The Balinese do not only make contact with other Indonesian etnic groups but also with other nations in the world, especially in the tourist regions on the island.

The variety of the Balinese language can be observed from the geographical and social points of view. From the geographical point of view we find the "Dataran" and "Aga" or "Mula" languages. The Dataran language is spoken by people who lives in the lowplain region whereas the Aga or Mula language is used in the mountanious areas.

The interference of other languages into the Balinese language can be classified in structural and terminological influences. The structural influences among other things come from foreign languages like for instance the Sankskrit language, whereas the terminological come from the Sangskrit, Javanese, Indonesian or Malayan, Chinese, Japanese and other modern foreign languages.

In accordance with a research made by Ngurah Bagus and his colleagues (1981 : 38-44) the Balinese language as one of the regional language in Indonesia has a strong dominant function as a formal as well as informal media of the families in the Balinese society. The function of the spoken language

Pengaruh bahasa lain terhadap bahasa Bali dapat dikelompokkan atas pengaruh struktur dan kosa kata. Pengaruh struktur bahasa Bali antara lain menerima sejumlah afis dari bahasa asing misalnya dari bahasa sansekerta, sedangkan dalam bidang kosa kata bahasa Bali menerima dari bahasa sansekerta, Jawa, Indonesia atau Melayu, Cina, bahasa asing modern dan bahasa Jepang.

Menurut hasil penelitian Ngurah Bagus dan kawan-kawan (1981: 38 - 44) menunjukkan bahwa bahasa Bali sebagai salah satu bahasa daerah di Indonesia memiliki fungsi yang sangat dominan sebagai alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat Bali, baik dalam situasi formal maupun tidak formal. Melalui bentuk bahasa secara lisan fungsi bahasa Bali sangat menonjol, tetapi melalui bentuk tulis, peranannya sebagai alat penghubung dalam keluarga.

Membina suatu bahasa berarti kita meningkatkan mutu pemakaian bahasa bersangkutan serta meningkatkan sikap para penutur bahasa itu ke arah yang makin positif.

d. Hubungan Sosial

Ditinjau dari segi susila, masyarakat Bali mengenal hubungan sosial dalam tiga kategori :
1. Hubungan antara yang lebih tinggi
2. Hubungan antara yang setara
3. Hubungan antara yang lebih rendah

Yang dimaksud dengan hubungan antara yang lebih tinggi adalah hubungan manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa, dengan guru wisesa dan dengan guru pengajian; guru rupaka. Selain golongan tersebut juga termasuk dengan golongan yang lebih tinggi ialah orang-orang yang berpengetahuan serta mempunyai tata susila yang lebih tinggi. Pemerintah harus dihormati dan diaati karena dia adalah suatu lembaga yang memelihara keadilan, melindungi dan mengadakan usaha untuk mencapai kebahagiaan masyarakat.

Dengan adanya keyakinan dirinya dikelilingi oleh beberapa jiwa-jiwa yang mempunyai persamaan dengan jiwanya sendiri, akan merasakan bahwa kepentingannya semua adalah kepentingannya sendiri juga. Selanjutnya pada diri masing-masing akan timbul pula perasaan menikmati kebahagiaan dan penderitaan yang dirasakan orang lain. Hubungan atas dasar kasih antara sesama yang sederajat harus terwujud dalam pikiran. Ini disebut hubungan setara.

Hubungan kita terhadap yang lebih rendah, kebajikan yang berupa kasih sayang dan murah hati yang diperlihatkan kepada orang yang lebih rendah derajatnya menurut keyakinan masyarakat tradisional Bali juga perlu dilakukan. Atas dasar kebajikan ini timbul kemauan baik terhadap yang berderajat lebih rendah yang terwujud dalam sikap orangtua, terhadap kelemahan si anak yang selalu ingin menggantungkan diri terhadap orang tua. Bahkan orang yang selalu bersedia mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi orang yang lemah dan orang yang menderita disebut pahlawan.

Dalam hubungan-hubungan sosial yang mencakup ketiga kategori tersebut, masyarakat Bali selalu berusaha berjalan selaras dengan pedoman-pedoman yang tercantum dalam ajaran-ajaran tata susila Hindu Dharma.

Sampai saat ini pengaruh catur warna masih dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari (yaitu hubungan Kasta). Pengaruh-pengaruhnya kalau kita nilai atas dasar kacamata hubungan sosial sekarang baik buruknya dalam arti sampai seberapa jauh pengaruh catur warna itu membantu sikap mental masyarakat Bali dalam pergaulan nasional. Pengaruh buruknya sampai menjadi penghambat bagi masyarakat Bali dalam kontaknya sebagia warga negara Republik Indonesia yang demokratis. Pengaruh catur warna dalam kehidupan sosial masyarakat Bali dapat kita bagi dalam beberapa segi. Masih ada sedikit kesulitan-kesulitan perkawinan antara kasta, yang pada umumnya dapat diatasi. Sebagai contoh pria dari kasta yang lebih rendah dari pada kasta wanita.

Dalam tata krama pergaulan sudah mulai berangsur-angsur diterima bahwa penggunaan bahasa halus tidak saja harus dilaksanakan oleh golongan bukan triwangsa (bangsawan) terhadap kaum bangsawan. Tetapi merupakan bahasa yang wajib dipakai bersama-sama tanpa membedakan golongan wangsa.

Dengan maksudnya agar anggota-anggota yang bukan orang Bali menjadi anggota banjar suka duka, sekalipun dalam batas-batas keanggotaan dengan hak-hak sosial dalam kematian saja. Hal ini sudah dapat membuka pintu organisasi banjar suka duka. Sebagai konsekuensinya banjar sebagai organisasi tradisional harus dapat merubah sekedar tata cara sehingga memungkinkan yang bukan orang Bali menikmati keunikan dari pada organisasi ini.

Suatu yang cukup unik terdapat pada orang Bali ialah seseorang bisa menjadi anggota yang baik dari beberapa organisasi yang punya latar belakang berbeda-beda.

Suatu kepercayaan masyarakat Bali, bahwa kita selaku pribadi-pribadi akan terus mengalami lahir berkali-kali ke dunia ini selama

is obvious, whereas the written is used as an important media between the families.

To develop a language means to increase the correct use of the language involved and the attitude of the users in a positive way.

Social Relationship

From the moral point of view the Balinese society acknowledges social relationship in three categories :
1 The relationship with the higher in grade.
2 The relationship with the equal in grade.
3 The relationship with the lower in grade.

The relationship with the higher in grade means the relation between human being with Sang Hyang Widhi Wasa, with Guru Wisesa and with the religion teacher : guru rupaka. People with high knowledge and people with a higher morality also belong to this group. The Government must be respected and obeyed, because this institution maintains justice, safeguards its population and makes every effort to develop the welfare of its society.

With the conviction that a person feels himself to be surrounded by many others with the same mind, he will feel that his interest is the same as that of the others. Later on every body will feel that their interests in dealing with welfare and agony are the same as the others. The relationship based on love between people with the same social level must be formed in their minds. This kind of relationship is called "hubungan setara" i.e the relationship with the equal in grade.

The relationship between us and the people of a lower grade in accordance with the conviction of the traditional Balinese society has to be done with love and pleasure. This good-heartedness will take their sympathy. This also can be observed in the attitude of parents who take care of their weak child who never try to go away from his or her parents home. Even a person who always commit himself to safeguard another one who is weaker than he is, will be seen as a hero.

In the social relationship concerning the three categories as mentioned before the Balinese society always makes efforts to live in harmony in accordance with the guidance as mentioned in the Hindu Dharma moral lessons.

Up till now the influence of catur warna (social caste stratum) can be found in the daily life, i.e. relationship between castes. From the point of today social view the negative or positive influence of this caste stratum may support the mental attitude of the Balinese society in its national assosiation. The negative or bad influence is an inhibiting factor of the Balinese society as a citizen of the democratic Republic of Indonesia in its effort to intercourse. The influence of the caste stratum in daily life can be devided in several points of view.

A marriage between two different caste members will face some difficulties; as an example, if the groom belongs to a lower grade caste than his bride.

In the intercourse custom the use of the same language grade between two different casetes has slowly been accepted. So nowadays the use of the bahasa halus (high grade language) is not neccesary if a member of the non triwangsa group (non aristocratic group) has to speak with a member of a triwangsa group (group with a higher grade caste). On the contrary this language has to be used as a common communication media for the society without treating the castes in a different way.

This too has the aim that a non Balinese person can be adopted as a member of the "banjar suka duka" (welfare assosiation) even though with a limited social right in the case of death. This will open the gates of the banjar suka duka organization. As a consequence this organization has to renovate its traditional system so that the non Balinese members have the chance to enjoy the uniqueness of the banjar.

Another uniqueness of the Balinese is that he or she can be a good member of several banjar organizations with different backgrounds.

Balinese society believers that every one of us shall reincarnate on earth for several times as long as we have not yet reached the eternal perfectness. After birth one has to make efforts to make and to do the best in his life. After the death the deeds will be evaluated in eternity; or one has to be reborn to expiate the sins or to perfect the shortcomings during his former life on earth.

The Balinese society is of the opinion that a person who lives from his properties without doing any work is the same as a thief. So we have to finance our life on earth with the result of our own legitimate hard work. This concept educates the Balinese society to be a hardworking society. The Balinese is not ashamed to do any kind of work as far as this work is tolerated by their religion. This is the reason why we can must a farmer who is also a handicrafts mand and an artist at the same time.
The daily row of work as a farmer, a handicraftsman and artist is the melody of his life.

The Balinese society has a pure open attitude. This open attitude is based on their big spiritual tolerance for others and other people with different background in tradition and custom will not disturb the existence of Balinese culture.

kesempurnaan abadi belum tercapai (inkarnasi). Pada saat lahir ke dunia pribadi-pribadi ini harus berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk mendapat penilaian nanti di alam sana. Atau harus lahir ke dunia beberapa kali guna menebus dosa-dosanya, atau menyempurnakan kekurangan-kekurangannya pada waktu hidupnya ke dunia terdahulu.

Masyarakat di Bali beranggapan bahwa hidup yang diperoleh dari begitu saja memakai benda-benda penunjang hidup tidak berbeda halnya dengan seorang pencuri. Maka hidup kita harus dibiayai dari jerih payah kerja halal dan suci. Konsepsi ini akan mendidik masyarakat Bali menjadi masyarakat yang rajin. Mereka tidak akan malu-malu mengerjakan apa saja asal dihalalkan agama. Maka kita lihat di Bali seseorang sebagai petani, pengrajin dan sekaligus juga sebagai seniman. Deratan kerja yang harus dia hadapi sehari-hari adalah sebagai petani, pengrajin dan seniman memberikan irama hidupnya.

Masyarakat Bali mempunyai sikap-sikap yang benar-benar terbuka. Sikap terbuka ini benar-benar didasarkan atas jiwa toleransi yang besar. Sepanjang masyarakat luar datang ke Bali dengan latar belakang kebiasaan yang berbeda, tidak sampai mengganggu eksistensi kebudayaan Bali.

6. Pemerintahan dan Sejarahnya

a. Pola Pemerintahan Tradisional :

Sejak masa sejarah kuno, Bali telah mengenal kerajaan-kerajaan yang meliputi seluruh wilayah pulau. Selama empat abad, antara 883 - 1343 M Bali diperintah tidak kurang oleh 21 raja. Dari Qri Kesari Warmadewa (Saka 835) sampai Qri Astasura Ratna Bumi Banten (Saka 1259).

Dalam masa pemerintahan Qri Maharaja Jayapangus misalnya antara 1099 - 1103 Saka atau 1178 - 1181 Masehi pola wewenang penguasaannya menempatkan raja **"Pinaka ta patraning Bhuwana, satungkep Bali Dwipamandala"** berada pada puncak pemerintahan. Dibawahnya ada sejumlah kelompok "Senopati"; di bawahnya lagi ada kelompok "Samgat"; disamping itu ada yang disebut "Tanda Rakryan". Mendampingi raja, ada kelompok "Mpungku Siwa Sogata" serta "Rsi Mahabramana". Dalam sidang-sidang kerajaan, para Pendeta Siwa Budha ini mendampingi raja sebagai penasehat di bidang spiritual. Senapati menerima perintah langsung dari raja dan menyampaikannya ke bawah maupun pada pelaksana-pelaksana lainnya. Dalam pemerintahan ini raja Jayapangus didampingi oleh dua permaisuri.

Setelah masuknya pengaruh kekuasaan Majapahit terutama dalam susunan pemerintahan disebut dengan zaman Bali pertengahan. Setelah Majapahit menguasai Bali (S 1265 atau 1343 M) dalam pemerintahan Qri Kresna Kepakisan di Samprangan tidak lagi disebut-sebut jenjang jabatan.

Patih dalam sistem pemerintahan tradisional adalah penerus perintah-perintah raja. Ia juga pelaksana yang mempunyai wewenang sangat besar ke dalam maupun ke luar, termasuk dalam jabatan militer. Dalam beberapa hal Patih adalah wakil raja. Dalam kehidupan buku zaman itu kitab hukum yang berlaku pada peradilan tradisional adalah Agama, Purwagama, Adigama dan Kutara Gama.

Membawahi suatu wilayah tertentu dalam kerajaan itu adalah seorang punggawa. Hal ini baru nampak setelah Pusat Kerajaan dari Gelgel dipindahkan ke Klungkung (1710 M). Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban demi suatu kejayaan kerajaan, seperti kepolisian, administrasi, upeti-upeti dan adat istiadat.

b. Masa Kolonial

Kerajaan tradisional di Bali berkembang setelah pemerintahan dinasti Kresna Kepakisan di Gelgel pindah ke Klungkung dan pergesakan-pergesekan dalam kekuasaan menimbulkan kerajaan-kerajaan yang lain seperti Karangasem yang memegang hegemoni di Buleleng dan Lombok, Kerajaan Badung, Kerajaan Payangan, Kerajaan Mengwi yang berhegemoni sampai ke Blambangan.

Secara fisik baru tahun 1908 seluruh Pulau Bali ditaklukkan Belanda, setelah raja Klungkung melakukan "Perang Puputan". Lambat laun mulailah Belanda mencampuri kekuasaan raja.

Sekitar tahun 1900 di Negeri Belanda terjadi pergeseran politik terhadap Indonesia. Dampak politik etis Belanda pertama-tama di Bali di bidang pendidikan dan kebudayaan. Setelah tahun 1919 Belanda menunjuk keturunan raja-raja Gianyar, Bangli dan Karangasem sebagai "Stedehouder". Tetapi penguasa pribumi ini tidak dapat berbuat sesuatu yang prinsipil tanpa persetujuan Kontroleur Belanda yang ditempatkan mendampingi di tiap-tiap daerah.

Setelah tahun 1929, dengan Stb 1929 No. 226 Belanda membentuk 8 negara di Bali yaitu Bangli, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Jembrana, Badung dan Klungkung. Negara ini disebut **Zelfbesturende Lanschappen** (Swapraja) dengan mengangkat seorang Kepala pribumi sebagai "Bestuurder".

6. Public Administration and Its History

a. Design of Traditional Public Administration

Since old historical age Bali was acquainted with kingdoms who were is control of the whole island. During four centuries between 883-1343 Bali was governed by not less than 21 Kings, from King Qri Kesari Warmadewa (in the year Saka 835) up to king Qri Antasura Ratna Banten (Saka 1259).

During the region of King Qri Maharaja Jayapangus in the Saka year between 1099-1103 or 1178-1181 Chr. the design of authority competence was to bring king ***"Pinaka ta patraning Bhuwana, satungkep Bali Dwipamandala"*** *to the top of the public administration. His subordinate was a group of persons with the rank of "Senopati". A more lower group had the rank of "Samgat". Beside those ranks there was the "Tanda Rakryan"; the assistans of the king were the group of "Mpungku Siwa Sogata" and the group of "Rsi Mahabramana". In royal conferences the Siwa Bhuda priests assisted the king as a consultant in spiritual matters. The Senopati received the direct order from the king and brought it to his subordinates or other executors. In the administration king Jayapangus was accompanied by his two queens.*

The period during which the organisation of the public administration was infleunced by the kingdom of Majapahit is called the Bali Middle age. After the domination of Bali by Majapahit (S 1265 or 1343 Chr) under the reign of Qri Kresna Kepakisan in Samprangan no more rank structure was mentioned.

The "Patih" in the traditional Public Administration system was the person who forwarded all the King's orders. He too was an executer who had a big competence in domestic as well as in foreign affairs including in military ranks. In some cases the Patih the Vice-king. In the manuscript, at that time the Code of Law which was in progress at the traditional judiciary was Religion, Purwagama, Adigama and Kutara Gama.

The "Punggawa" was the person who ruled a certain region in the Kingdom. It has been found out after the Kingdom of Glegel was moved to Klungkung (1710 Chr). Hismain job was to take care of the security and to maintain law and order on behalf of a glorious Kingdom, like the police, the administration, the tributes and the traditional custom.

b. The Colonial Period

The traditional Kingdom in Bali was developed after the reign of the Kresna Kepakisan dynasty moved to Klungkung and after contradictories in power had emerged other Kingdoms like the Kingdom of Karangasem which had the hegemony over Buleleng and Lombok, the Kingdom of Badung, the Kingdom of Payangan and the Kingdom of Mengwi which had the hegemony over the region up to Blambangan.

The whole island of Bali was physically defeated by the Dutch in 1908 after the King of Klungkung fought against their forces, known as the "Perang Puputan". Step by step the Dutch got involved in the power of the King.

Around 1900 in the Netherlands there was a change in the course of policy against Indonesia. The first ethical policy smash of the Dutch in Bali was the policy in culture and education. After 1919 the Dutch government appointed the descendants of the Kings of Gianyar, Bangli and Karangasem as "Stedehouder" (the head of a region). But these native rulers could not do any principal thing without the agreement of the Dutch controller who was posted in every region to assist them.

After 1929 with the Decree Stb 1929 No 226 the Dutch formed 8 States in Bali, i.e. the States of Bangli, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Jembrana, Badung and Klungkung. These states were called ***Zelfbesturende Landschappen*** *(Swapraja = selfreigning landscapes) with a native Head posted as a "Bestuurder" (manager).*

This Administration system was developed with a Royal Decree in 1938 (stb 1938 No 529). The Administration in every selfreigning landscape was managed in accordance with the valid local traditional customs and had the power of attorney in their region concerning religion, justice and police. This power was only valid for those who belonged to the "Anak Buah Kerajaan" (Royal members) group i.e. the non-European, the non-foreigner from Eastern countries, the non-Government servants and the non-labours under a contract which contained punishment clauses.

During the Japanese occupation which begun from the 19th of February 1942 the controllers in the selfreigning regions were replaced by the "Bunken Kanrikan".

c. The Period after the Proclamation of Independence

In line with the struggle of the Balinese population in its physical revolution against the Ducth, big ideas of the society in the region emerged to fulfill democracy. Therefore it was needed to have an institution close to a legislative form in a parliamentary system which also had to decide in matters concerning the people's interest.

The youth who were fighting in the woods and in the mountains had never forgotten to think of a Regional Administration. With all kinds of method

Tata pemerintahan ini disempurnakan melalui aturan pemerintahan kerajaan tahun 1938 (stb 1938 No 529). Pemerintahan di masing-masing Swapraja diatur menurut adat istiadat yang berlaku setempat dan mempunyai kekuasaan dalam wilayahnya mengenai agama, pengadilan dan kepolisian. Kekuasaan ini diberlakukan hanya bagi mereka yang digolongkan "Anak Buah Kerajaan" yaitu mereka yang bukan Eropa, bukan Timur Asing, bukan pegawai Gupermen serta bukan pekerja-pekerja yang terikat dengan perjanjian kerja yang mengandung syarat hukuman.

Pada masa pendudukan Jepang yang dimulai tanggal 19 Februari 1942 di daerah-daerah swapraja pejabat controleur digantikan dengan Bunken Kanrikan.

c. *Masa Setelah Kemerdekaan*

Sejalan dengan perjuangan rakyat Bali melalui revolsi fisik melawan kekuasaan Belanda, dalam masyarakat daerah timbul pikiran-pikiran untuk melaksanakan pendemokrasian. Untuk ini perlu adanya badan, yang mendekati bentuk legislatif dalam sistem parlementarisme yang bertugas ikut mengambil keputusan dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat.

Para pemuda yang berjuang di hutan dan di gunung-gunung waktu itu tidak lupa memikirkan pemerintahan daerah. Dengan berbagai cara telah didesakkan aspirasinya yang dirumuskan dalam 8 hal :

1) Pemerintahan yang perlu dibangun harus memelihara keadilan terhadap siapapun. Terhadap pegawai-pegawai pemerintah harus diadakan saringan teliti, agar tidak timbul kesan "orang-orang itu saja yang berkuasa".
2) Dalam mengangkat pegawai harus diperhatikan **akseptabelitas** dan **kapabelitasnya.**
3) Sifat famili atau sistem sahabat harus dihilangkan.
4) Dalam peraturan gabungan kerajaan-kerajaan diadakan perubahan yang jelas, agar terang nampak sistem demokrasi yang jadi dasar negara. Dalam hubungan ini diusahakan suatu Dewan Pemerintahan terdiri dari ketua dan beberapa anggota.
5) Susunan Paruman Agung diubah, untuk memperlihatkan dan dapat melaksanakan perundangan dalam melaksanakan pemerintahan.
6) Paruman negara di tiap swapraja dihapuskan. Cukup dengan Advies College saja, yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli.
7) Lekas didatangkan TNI ke Bali.
8) Reorganisasi di kalangan polisi, sebab polisi sukar diterima oleh rakyat.

Sementara itu, Negara Indonesia Timur (NIT) telah dibentuk dalam Konferensi Denpasar, yang berlangung tanggal 24 Desember 1946.

Paruman Agung pada tanggal 28 Desember 1946 melangsungkan rapat untuk menyesuaikan keadaan dengan terbentuknya NIT. Rapat itu memutuskan :
Bali masuk ke dalam Negara Indonesia Timur; kekuasaan Pemerintahan Daerah Bali berada pada gabungan kerajaan-kerajaan di Bali; Gabungan kerajaan berfungsi sebagai eksekutip berbentuk Dewan Raja-raja; Untuk Badan Legislatif (meliputi seluruh Bali) Paruman Agung yang ada akan dibubarkan, diganti dengan aruman Agung (baru) yang akan dipilih langsung oleh rakyat. Demikian juga di tiap daerah Swapraja, Paruman Negara yang ada dibubarkan, diganti dengan Paruman Negara (baru) dipilih langsung oleh rakyat. Ketua-ketua Badan Legislatif ini dipilih diantara anggotanya; Anggota Paruman Agung dari suatu swapraja dengan sendirinya sebagai anggota Paruman Negara di daerahnya.

Hal ini dimuat dalam Undang-Undang pembentukan Gabungan Kerajaan-kerajaan di Bali tanggal 26 Feburai 1947 No 1/1947, yang berlaku mulai 1 Maret 1947. Dalam Undang-undang ini ada 15 macam kekuasaan yang terperinci sebagai hal yang diserahkan menjadi urusan gabungan. Kekuasaan-kekuasaan raja-raja atas dasar Zelfbestuursregelen 1938 (Daerah Statuut). Ternyata kekuasaan gabungan kerajaan-kerajaan ini ditambah lagi dengan penyerahan semua kekuasaan residen yang dilakukan tanggal 14 Maret 1949

Gabungan kerajaan-kerajaan ini sebagai eksekutif dimantapkan dalam bentuk Dewan Raja-raja dan sebagai ketuanya terpilih AA Gde Oka, raja Gianyar, menggantikan AA Gde Agung yang aktif mengambil bagian di NIT.

Dengan Undang-undang No 1/1947 itu, Paruman Agung (36 orang) itupun dibubarkan, diganti dengan Paruman Agung baru. Paruman Agung baru merupakan pilihan langsung, sebagai lembaga legislatif yang dinyatakan mempunyai hak-hak: inisiatif, amandemen dan interpelasi. Juga Paruman Negara di daerah-daerah Swapraja dipilih langsung oleh rakyat.

Tahun 1950 merupakan tahun akselerasi proses pendemokrasian di Bali. Negara-negara bagian RIS yaitu NIT adalah salah satu diantara-

they urged their aspiration which had been formulated in this 8 items :

1) *The Administration to be set up must have the power to maintain justice against anybody. Every government servant has to be screened so that the impression of having "the same persons come into power" can be neglected.*
2) *In the adopting of employees the Administration must observe the* ***acceptability*** *and* ***capability*** *of the persons involved.*
3) *Family attitude or colleague system has to be left out.*
4) *In the Common Regulations of the Kingdoms the items has to be clearly changed so that the democratic system as a foundation of the State can be clearly seen.*
5) *The "Paruman Agung" structure has to be changed to be able to show and to execute the Regulation in the Public Administration.*
6) *In every selfreigning landscape the Paruman Agung has to be liquidated. It is enough to have only a College Advice consisting expert members.*
7) *To urge the immediate arrival of the TNI (Indonesian National Army) in Bali.*
8) *To reorganize the Police structure, because the people cannot accept them very well.*

In the meantime on the 24th December 1946 the Bali conference had proclaimed the State of East Indonesia (NIT).

On the 28th December 1946 the Paruman Agung held a conference to adjust to the situation as a result of the forming of the State of East Indonesia. The conference decided :

Bali will be integrated in the State of East Indonesia; The authority of the Provincial Administration will be in the hands of the Alliance of Kingdoms in Bali; The Alliance of Kingdoms has the function as an Executive Body in the form of a Council of Kings; For the Legislative Body (governing the whole island of Bali) the existing Paruman Agung will be liquidated and replaced by a new Paruman Agung which members will be elected by the people; In all the selfreigning landscapes the Paruman Agung has to be liquidated likewise and be replaced by a new Paruman Agung in direct election by the people. The Heads or Chairmen of the Legislative Body will be elected from its members; A member of the Paruman Agung of a selfreigning landscape automatically will be a member of the Paruman Negara in his region.

This was stated in the Law of the foundation of the Alliance of Kingdoms in Bali dated the 26th February 1947 No 1/1947, valid from the 1th March 1947. This law contained 15 different kinds of authorities with its details to be forwarded to the Alliance to be its responsibility. The authorities of the Kings would be based on the "Zelfbestuursregeler 1938" (Regulation of otonomy 1938). It was found that the authority of the Alliance of Kingdom had been added with the delegation of all the authqrities of the Resident which took place on the 14th March 1949.

This Alliance of Kingdoms as an Executive Body was stabilized in the form of a Council of Kings and the elected Chairman was Mr AA Gde Oka, the King of Gianyar, replacing Mr AA Gde Agung, who would be active in the Administration of the State of East Indonesia.

With the Law No 1/1947, this Paruman Agung (with its 36 members) too was liquidated and replaced by the new Paruman Agung. The new elected Paruman Agung as a Legislative Body had the right to make : initiatives, amendments and interpellations. The Paruman Negara in the selfreigning regions would also be direct elected by the people.

1950 was the year of acceleration in the process of democracy in Bali. All the Partition States of the RIS (Republik Indonesia Serikat = the United States of the Republic of Indonesia) in which Bali was one of them wanted a Unitary State again just as it was the aim of the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia on the 17th August 1945.

Before the forming of this Unitary State on the 6th June 1950 the Paruman Agung held an emergency meeting and legalized the Regulation No 1/Darurat. This Regulation called for the forming of an executive body of the Administration consisting the Chairman of the Council of Kings as Chairman and also as member and 4 other members appointed by the Council of Kings as proposed by the Paruman Agung. This executive body had to carry out the tasks of the Council of Kings Administration. The elected members at that time were : I Gusti Putu Merta, I Wayan Badra, I Gusti Gde Subamia and I Wayan Dangin. The chairman was A. Agung Gde Oke (the King of Gianyar) and chairman of the Council of Kings.

On the 15th June 1950 the Administration of the State of East Indonesia (NIT) announced the Law No 44/1950 concerning the Regional Administration, in which the structure had been ajusted to the Law No 22/[illegible] of the Republic of Indonesia (Yogya). Basically this two Laws represented a highway for the effort to have democracy in the Administration system with a broad autonomy, in accordance with the rights of the region based on the Law of its formation (statuut region).

In the meantime, the political organizations in the society of the region had developed in such a way, that the Paruman Agung at that time had been found unrepresentative. At least the Paruman Agung was liquidated

nya mulai menghendaki kembali ke Negara Kesatuan, seperti tujuan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Menjelang terbentuknya negara Kesatuan itu, pada tanggal 6 Juni 1950 Paruman Agung mengadakan sidang darurat dan mengesahkan Peraturan No 1/Darurat. Peraturan ini menetapkan pembentukan Badan Pelaksana Pemerintahan Daerah terdiri dari Ketua Dewan Raja-raja selaku ketua merangkap anggota dan 4 orang anggota yang diangkat oleh Dewan Raja-raja atas usul Paruman Agung. Badan Pelaksana inilah yang melaksanakan seluruh tugas Pemerintahan Gabungan Kerajaan-kerajaan. Sebagai anggota terpilih waktu itu : I Gusti Putu Merta, I Wayan Badra, I Gusti Gde Subamia dan I Wayan Dangin. A Agung Gde Oka (raja Gianyar) Ketua Dewan Raja-raja sebagai ketua.

Tanggal 15 Juni 1950 Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) mengeluarkan Undang-undang No 44/1950 tentang Pemerintahan Daerah, yang susunannya disesuaikan dengan Undang-undang No 22/1948 dari Pemerintah Republik Indonesia (Yogya). Pada dasarnya kedua Undang-undang ini merupakan saluran untuk arus deras pendemokrasian tata pemerintahan dengan otonomi yang luas, sesuai dengan hak-hak daerah berdasarkan hukum pembentukannya (daerah statuut).

Sementara itu, organisasi-organisasi politik telah berkembang sedemikian rupa di masyarakat daerah, sehingga Paruman Agung di saat-saat itu sudah dirasakan tidak representatif lagi. Akhirnya Paruman Agung dibubarkan pada tanggal 29 September 1950, atas dasar Keputusan Ketua Badan Pelaksana/Ketua Dewan Raja-raja No 7/ Darurat 1950, digantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) daerah Bali. Waktu itu I Gusti Putu Metra dipilih menjadi ketua DPRDS. Jumlah anggotanya 41 orang, dengan perincian : 11 orang wakil Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia (KPNI), 9 orang wakil Partai Nasional Indonesia (PNI), 6 dari Masjumi, 3 dari Ikatan Rakyat Murba Indonesia (IRMI), 2 dari Gabungan Buruh Indonesia (GBI), 3 orang wakil wanita, 2 orang wakil golongan tani dan 5 orang wakil ditunjuk oleh Badan Pelaksana, yaitu masing-masing 2 orang wakil golongan ahli, 2 orang golongan masyarakat India, 1 orang golongan masyarakat Tionghoa, dan 1 orang wakil golongan masyarakat Kristen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Daerah Bali selanjutnya memilih Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS) daerah Bali, dengan anggota-anggotanya : I Gusti Gde Subamia unsur KPNI, I Gusti Made Mudra dan I Wayan Dangin unsur PNI, dan I Gusti Bagus Sugriwa unsur IRMI.

Untuk Kepala Daerah diajukan dua orang calon kepala Presiden RI, keduanya dari KPNI, yaitu AAB Sutedja dan Cokorda Anom Putra. Presiden mengangkat AAB Sutedja sebagai Kepala Daerah merangkap Ketua DPDS Daerah Bali. Dengan ini diadakan serah terima Pimpinan Pemerintah Daerah Bali AA Gde Oka/Ketua Dewan Raja-raja kepada Anak Agung Bagus Sutedja bertempat di Pendopo Hotel Bali.

Di daerah-daerah swapraja, untuk menggantikan Paruman Negara dibentuklah DPRDS Daerah Bagian, dengan pemerintahannya bersifat Collegiaal (DPDS) dan sebagai ketuanya tetap kepala daerah swapraja yang bersangkutan.

Dibawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sebagai realisasi pemerintahan demokrasi maka tahun 1955 dilangsungkan pemilihan umum yang pertama di Indonesia, untuk memilih anggota-anggota Konstituante dan DPR. Sistem "banyak partai" yang berkembang waktu itu menggambarkan perimbangan kekuatan baru dalam masyarakat di Daerah Bali.

Suasana pemerintahan di pusat sangat labil, di tengah-tengah inilah lahirnya Undang-undang No 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, dengan mencabut Undang-undang NIT No 44 Tahun 1950 maupun Undang-undang RI No 22 tahun 1948.

Sebagai realisasi Undang-undang No 1 tahun 1957 ini, pimpinan Pemerintahan Daerah di Bali tetap dipegang oleh kepala daerah yang dalam hal ini Anak Agung Bagus Sutedja. Kepala Daerah didampingi oleh suatu Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang dipilih menurut perimbangan kekuatan dalam masyarakat Daerah, hasil Pemilu Pertama 1955 itu. Sebagai anggota DPD Bali ada 5 orang, yaitu : 1) I Gusti Made Mudra, 2) Drs Dewa Made Wedagama, 3) Bagus Putu Merta Pastime (ketiganya dari Partai Nasional Indonesia), 4) I Gusti Ketut Arka dan 5) Gde Ketut Buana (Partai Sosialis Indonesia). Menurut SK DPRD Peralihan Daerah Bali 30 Mei 1959 No 1/SK/DPRD/1959 dapat digambarkan perimbangan kekuatan politik hasil Pemilu 1955 di Bali tercatat 48% untuk PNI, 37% untuk PSI, 10% untuk PKI, 2% untuk Masjumi, 2% untuk NU, dan 1% untuk Partai Katolik.

d. Terbentuknya Propinsi Bali

Undang-undang No 64 tahun 1958 yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 1958 pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya di Nusa Tenggara. Hal ini

on the 29th September 1950 based on the Decree of the Chairman of the Executive Body/the Chairman of the Council of Kingdoms No 7/Darurat 1950, and replaced by the Temporary Provincial House of Representatives (DPRDS) in the Province of Bali. The elected Chairman and that time was I Gusti Putu Metra. The DPRS had 41 members with the specification : 11 members representing the Unity of the Indonesian National Youth (Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia = KNPI), 9 members representing the Indonesian National Party (Partai Nasional Indonesia = PNI), 6 members from the Masyumi (an Islamic party), 3 members from the Ikatan Rakyat Murba Indonesia (IRMI = Association of the Indonesian grass-root society), 2 members from the Gabungan Buruh Indonesia (GBI = Federation of the Indonesian labour), 3 members representing the women, 2 members representing the farmers group and 5 members appointed by the Executive Body, i.e. persons representing the experts group, 2 persons from the Indian minority group and 1 person representing the Christian society.

Furthermore the DPRDS in the region of Bali elected the temporary Provincial Council (DPDS = Dewan Pemerintah Daerah Sementara) with its members : I Gusti Gde Subamia from the KNPI, I Gusti Made Mudra and I Wayan Dangin from the PNI, and I Gusti Bagus Sugriwa from the IRMI.

For the Governorship of the province 2 persons had been proposed to the President of the Republic of Indonesia. Both of them are members of the KNPI, i.e. AAB Sutedja and Cokorda Anom Putra. The President appointed AAB Sutedja as the Governor of the Province which also hold the position of Chairman of the DPDS in Bali. Hereby AAB Sutedja had to replace AA Gde Oka. The official transfer of authority took place at the Pendopo (open audience hall) of Bali Hotel.

To replace the Paruman Negara in the selfreigning regions a DPRDS of the partition region had been set up with a colleague system of Administration (DPDS) and with the same Head of the selfreigning region involved as its Chairman.

Under the Temporary Basic Law of 1950 as a realization of a democracy Administration, therefore, the first General Elections in Indonesia was held in 1955, to elect the members of the Constituent Assembly and the House of Representatives (DPR). The development of the "Multi Party" system at that time showed the balance of new powers in the Balinese society.

During the period of political instability in Jakarta the central Administration announced the Law No 1 - 1957 concerning the basic of the provincial Administration and the invalidity of the NIT Law No 44 - 1950 as well as the RI Law No 22 - 1948.

As a realization of this new Law the Chairmanship of the Provincial Administration in Bali remained in the hands of Anak Agung Bagus Sutedja, the Governor. He was assisted by the DPD which had been elected in accordance with the balance of power in the society during the first General Elections in 1955. The DPD in Bali had 5 members : 1) I Gusti Made Mudra, 2) Drs Dewa Made Wedagama, 3) Bagus Putu Merta Pastime (all of them from the PNI group), 4) I Gusti Ketut Arka and 5) Gde Ketut Buana (from the PSI the Partai Sosialis Indonesia).

In accordance with the Decree of the Interim DPRD of the Province of Bali on the 30th May 1959 No 1/SK/DPRD/1959 it can be observed that the balance in political power as a result of the General Elections in 1955 was as follow : For the PNI 48%, for the PSI 37%, for the PKI (The communist Party of Indonesia) 10%, for the Masyumi 2%, for the NU (Nahdatul Ulama, and Islamic party) 2% and 1% for the Catholic Party.

d. The establishment of the Province of Bali

Principally the Law No 64 - 1958 announced on the 14th August 1958 had the aim to develop the social-economic and social-cultural life in Nusa Tenggara. This was in line with the reality concerning the living condition of the society at that time. This law all at once liquidated the Administrative province of Nusa Tenggara, which had been established based on the Law No 21 - 1950. Afterward the provincial zones of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara came into being, every zone with the status of Province. At that time the capital of Bali was Singaraja, but in accordance with the Decree of the Minister of Home Affairs (Menteri Dalam Negeri) and Regional Autonomy on the 23th June 1960 No 52/2/36/136 must be removed to Denpasar. Based on a DPR-resolution of the Province of Bali, the 14th August 1958 was declared as the Establishment Day of the Province of Bali. This Resolution was based on the Governor's decree on the 14th August 1975 No 18/HK.2/KK/1975. Law No 64-1958 concerning the establishment of the Province of Bali only mentioned the secretary of the Region (SEKDA, Sekretaris Daerah) as Head of the Secretariat, whereas Law No 5 - 1974 mentioned the Head of the Secretariat as to be Secretary of the Region & Zone (SEKWILDA, Sekretaris Wilayah dan Daerah).

The organization structure of the Zone and Regional Secretariat headed by SEKWILDA was reorganized several times since the announcement of Law No 4/1975.

The Province of Bali consists of 8 Districts and each of them had Capital City, i.e. :

sesuai dengan realita kehidupan masyarakatnya waktu itu. UU ini sekaligus membubarkan propinsi (administratif) Nusa Tenggara yang terbentuk atas dasar UU No 21 tahun 1950. Kemudian dibentuklah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing berstatus Propinsi. Waktu itu ibukota Daerah Tingkat I Bali masih di Singaraja, tetapi dengan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960 No 52/2/36/136 ibukota Singaraja dipindahkan ke Denpasar. Atas resolusi DPR Daerah Tingkat I Bali, tanggal 14 Agustus 1958 inilah ditetapkan sebagai hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Bali, atas dasar surat Keputusan Gubernur 14 Agustus 1975 No 18/HK.2/KK/1975. Undang-undang No 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Bali menyebutkan pimpinan perangkat kesekretariatan hanya dengan sekretaris daerah, Undang-undang No 5 tahun 1974 menyebutkan pimpinan sekretariat ini dengan sekretaris wilayah/daerah.

Susunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali yang dipimpin oleh Sekwilda, sejak ditetapkan Undang-undang No 4/1975, telah mengalami beberapa kali perubahan.

Daerah Propinsi Bali terdiri dari 8 Kabupaten dan masing-masing Kabupaten mempunyai ibukota. Adapun 8 Kabupaten tersebut beserta ibukota Kabupatennya ialah :

a) Kabupaten Buleleng ibukotanya Singaraja
b) Kabupaten Jembrana ibukotanya Negara
c) Kabupaten Tabanan ibukotanya Tabanan
d) Kabupaten Badung ibukotanya Denpasar
e) Kabupaten Gianyar ibukotanya Gianyar
f) Kabupaten Klungkung ibukotanya Klungkung
g) Kabupaten Bangli ibukotanya Bangli
h) Kabupaten Karangasem ibukotanya Amlapura.

Lihat Tabel I-6.

Desa di Bali mengandung dua pengertian yaitu :

1. Yang mengarah kepada suatu organisasi Pemerintahan yang terkecil di bawah camat.
2. Menunjuk kepada suatu organisasi tradisional (adat) yang terikat dengan suatu aturan-aturan adat setempat disebut Desa Adat.

Kedua jenis desa ini merupakan organisasi yang meliputi sekelompok rakyat yang mendiami suatu wilayah yang tertentu, dimana antara keduanya tedapat variasi hubungan sebagai berikut :

1) Ada wilayah Desa/Kelurahan yang sama wilayah dan pendukungnya dengan satu Desa Adat.
2) Ada beberapa Desa/Kelurahan yang meliputi beberapa Desa Adat.
3) Ada wilayah Desa/Kelurahan yang meliputi sebagian Desa Adat tertentu dan sebagian lagi Desa Adat lainnya yang variasinya bermacam-macam.

Sebagai hasil nyata perkembangan Pembangunan di Bali dengan makin banyaknya Desa-desa Swasembada.

e. DPRD dan Pemilu

Setelah peristiwa G 30 S/PKI lahirlah Orde Baru yang sejak semula bertekad untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Langkah Orde Baru dalam menata kehidupan kenegaraan antara lain dengan membentuk dan memfungsikan Lembaga-lembaga Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hubungan ini, diselenggarakan Pemilu 1971 untuk membentuk MPR, DPR dan DPRD atas pilihan rakyat. Di daerah Bali pada Pemilu 1971 terdapat sembilan buah Parpol dan satu buah Golkar yang itu sebagai peserta Pemilihan Umum. Namun demikian, hanya tiga buah Parpol dan satu buah Golkar yang berhasil mempunyai Wakil di DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Secara lengkap komposisi keanggotaan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali hasil Pemilu 1971 sebagai berikut:

a) Golkar	=	27 buah
b) Partai Katholik	=	1 buah
c) PNI	=	3 buah
d) IPKI	=	1 buah
e) ABRI	=	6 buah
f) Non-ABRI	=	2 buah
J u m l a h	=	40 buah

Dalam Pemilu 1977 PPP memperoleh suara 1,63%, Golkar 85,30% dan PDI 13,06% dengan wakil di DPRD : PPP 1 orang, Golkar 28 orang dan PDI 4 orang. Disamping itu anggota yang diangkat dari ABRI 5 orang dan non-ABRI 2 orang.

Dalam Pemilu 1982 masing-masing kontestan memperoleh suara : PPP 1,92%, Golkar 88,34% dan PDI 9,74% dengan komposisi keanggotaan DPRD I sebagai berikut :

1) PPP	=	1 orang;
2) Golkar	=	28 orang;

a) The District of Buleleng has its capital Singaraja
b) The District of Jembrana has its capital Negara
c) The District of Tabanan has its capital Tabanan
d) The District of Badung has its capital Denpasar
e) The District of Gianyar has its capital Gianyar
f) The District of Klungkung has its capital Klungkung
g) The District of Bangli has its capital Bangli
h) The District of Karangasem has its capital Amlapura.

Table I-6 shows the number of Districts, Subdistricts, Villages, Kelurahan (Administrative area), Banjar dinas/Dusun, Desa adat (village with traditional Law or custom) and its perimeter.

There were two types of Villages (Desas) in Bali.

1) The desa which is the smallest administration, the Rural Administration, supervised by the Head of the Sub-district, the "Camat".
2) The desa which has tight links with the local traditional customs with the name of "Desa Adat"

Both types of Desa have the form of an organization in which the members are a group of people who lives in a certain areas.

There are a variety of relationship between those two desas mentioned above.

1) There are some Desas/Kelurahans which area and population also belong to one Desa Adat.
2) There are some Desas/Kelurahans which have a number of Desa Adats in its area.
3) There are some Desas/Kelurahans which have two different Desa Adats with a variety of customs in its area.

The extention of the development has establishment more and more self-sufficient desas.

e. DPRD and Pemilu (General Elections)

After the communist aborted coup known as the G30S/PKI the new born New Order (Orde Baru) is determined to accomplish regulations for a new mode of living in Indonesia fully based on the 1945 Constitution.

The first step of the New Order in accomplishing regulations in law and order among other things is to establish and to activate the State Institutions as mentioned in the Constitution of 1945. In this relation the 1971 Pemilu has been held to establish the People's Consultative Assembly (MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat), the DPR and DPRD as elected by the people. There are nine political parties (Parpol, partai politik) and the government-backed quasy party (Golkar, golongan karya) which have attended the General Elections in 1971. Nevertheless only three Parpols and one Golkar succeeded to have their representative in the DPRD of the Province of Bali. The complete composition of the memberhsip in the DPRD as the result of the 1971 Pemilu is as follows :

a) Golkar	*= 27 members*
b) Catholic Party	*= 1 members*
c) PNI	*= 3 members*
d) IPKI	*= 1 members*
e) The Army (ABRI)	*= 6 members*
f) Non-ABRI	*= 2 members*
Total	*= 40 members*

In the 1977 Pemilu the Development Unity Party (PPP, Partai Persatuan Pembangunan) got 1,63% of the votes, Golkar 85,30% and the Indonesian Democratic Party (PDI, Partai Demokrasi Indonesia) 13,06%. Their Representatives in the DPRD are : PPP 1 person, Golkar 28 persons and PDI 4 persons, besides 5 appointed members from the ABRI and 2 persons from the non-ABRI.

In the 1982 Pemilu the percentage of votes is as follows : PPP 1,92%, Golkar 88,34% and PDI 9,74% with a membership composition in the DPRD I for :

1) PPP	*= 1 persons*
2) Golkar	*= 28 persons*
3) PDI	*= 3 persons*
4) ABRI	*= 6 persons*
5) Non-ABRI	*= 2 persons*

Next to the DPRD is the Provincial Judgement Board (Badan Pertimbangan Daerah, BPD) which considerations concerning the regional Administration, especially concerning autonomy, to the Governor.

f. List of Governers in Bali

1) Anak Agung Nyoman Panji Tisna, the King of Buleleng as Chairman of the Paruman Agung in 1946. During the Japanese occupation it is not clear whether the "Cho Kan" in Singaraja who replaced the Resident, also replaced the position of the Dutch Resident as Chairman of the Paruman Agung.

Tabel / *Table I — 6*

JUMLAH KABUPATEN, KOTA ADMINISTRATIF, KECAMATAN, DESA, KELURAHAN, BANJAR, DINAS/DUSUN, LINGKUNGAN DAN BANJAR ADAT DI PROPINSI DATI I BALI
NUMBER OF DISTRICTS, ADMINISTRATIVE CITIES, SUB—DISTRICTS, VILLAGES, ADMINISTRATIVE AREAS, BANJAR, DINAS/SMALL VILLAGE, SETTING AND BANJAR ADAT IN THE PROVINCE OF BALI

No.	Kabupaten *District*	Kota Adm. *Adm. city*	Kecamata *Sub-district*	Desa *Village*	Kelurahan *Adm. Area*	Banjar dinas /dusun	Lingkungan *Setting*	Desa Adat *Trad Vil.*
1.	Badung	1	7	53	23	412	197	152
2.	Buleleng	-	9	126	19	392	40	155
3.	Jembrana	-	4	40	9	175	34	45
4.	Tabanan	-	8	91	9	636	66	211
5.	Gianyar	-	7	49	6	455	40	265
6.	Bangli	-	4	65	4	161	25	135
7.	Klungkung	-	4	50	6	225	18	320
8.	Karangasem	-	8	41	3	485	52	156
	Jumlah / *Total*	1	51	515	79	2.941	472	1.439

Sumber : Biro Bina Pembangunan Desa
Source : Biro Bina Pembangunan Desa

3) PDI = 3 orang;
4) ABRI = 6 orang;
5) non-ABRI = 2 orang.

Disamping DPRD ada lagi Badan Pertimbangan Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah mengenai jalannya pemerintahan daerah, khususnya mengenai otonomi.

f. Para Kepala Daerah di Bali

1) Anak Agung Nyoman Panji Tisna, raja Buleleng sebagai Ketua Paruman Agung tahun 1946. Waktu zaman Jepang, apakah Cho Kan di Singaraja yang menggantikan kedudukan Residen, juga menggantikan kedudukan Residen Belanda sebagai Ketua Paruman Agung, ini tidak jelas.

2) Anak Agung Gde Oka, raja Gianyar terpilih sebagai Ketua Dewan Raja-raja tahun 1947, yaitu setelah Negara Indonesia Timur terbentuk menggantikan Anak Agung Nyoman Panji Tisna. Pemilihan dilakukan dalam pertemuan Paruman Agung tanggal 28 September 1946, yang sekaligus mengubah Paruman Agung (Federasi Raja-raja di Bali) menjadi gabungan Kerajaan-kerajaan di Bali yang berfungsi sebagai badan eksekutif. Sebagai legislatif dibentuklah Paruman Agung (baru) terdiri dari wakil-wakil delapan daerah kerajaan dan tiap swapraja dibentuk Paruman Negara.

3) Anak Agung Bagus Sutedja, terpilih sebagai kepala daerah pada September 1950, sejalan dengan pesatnya proses pendemokrasian di Bali setelah negara kesatuan terbentuk 17 Agustus 1950 terbentuk pula Dewan Pemerintah Daerah. Waktu itu keluarlah keputusan Dewan Pemerintah Daerah tanggal 20 September 1950 No 7/1950, yang membubarkan Paruman Agung, digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) yang pertama-tama telah memilih kepala daerah.

4) I Gusti Agung Oka, seorang residen dalam pemerintah administratif Sunda Kecil (dibentuk atas peraturan Pemerintah No 21/1950) ditunjuk bulan Oktober 1958 sebagai pejabat sementara kepala daerah Bali. Waktu itu adalah masa peralihan untuk melaksanakan Undang-undang No 64/1958, tentang pembentukan daerah Bali sebagai daerah otonom tingkat I beserta pembentukan kabupaten daerah tingkat II di Bali, bersama-sama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tugasnya : a) membentuk badan legislatif yaitu DPRD (tanpa S), b) DPRD memilih kepala daerah, maka terpilihlah bulan Desember 1959 Anak Agung Bagus Sutedja sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

5) Anak Agung Bagus Sutedja, terpilih kembali tahun 1959 sampai dengan G 30 S/PKI tahun 1965. Dalam rangka demokrasi terpimpin dan pelaksanaan Undang-undang No 18/1965, Dewan Pemerintah Daerah (sebagai Collegiaal) diganti dengan Badan Pemerintah Harian (BPH). Kepala daerah adalah juga ketua BPH dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 18 Desember 1965 No 380/165, Sutedja diberhentikan sebagai kepala daerah digantikan oleh Pjs Kepala Daerah I G P Merta.

Tabel / *Table I — 7*

PERKEMBANGAN DESA-DESA DI BALI AKHIR PELITA II DAN AKHIR PELITA III
THE DEVELOPMENT OF DESAS IN BALI AT THE END OF PELITA II AND PELITA III

No.	Kabupaten *District*	Klasifikasi Desa / *Desa Classification*					
		Pelita II / *2nd Five year plan*			Pelita III / *3rd Five year plan*		
		Swadaya *Auto-activity*	Swakarya *Self-activity*	Swasemda *Self-sufficient*	Swadaya *Auto-activity*	Swakarya *Self-activity*	Swasemda *Self-sufficient*
1.	Buleleng	-	102	40	-	61	84
2.	Jembrana	-	19	30	-	6	43
3.	Tabanan	-	47	52	-	6	94
4.	Badung	-	35	16	-	24	52
5.	Gianyar	-	28	23	-	15	40
6.	Bangli	-	59	10	-	44	25
7.	Klungkung	-	31	25	-	24	32
8.	Karangasem	-	30	14	-	24	20
	Jumlah *Total*	-	251	210	-	204	390

Sumber : Dit Bangdes Propinsi Bali

2) Anak Agung Gde Oka, the King of Gianyar was elected as Chairman of the Council of Kings in 1947 after the establishment of the NIT (State of East Indonesia) replacing Anak Agung Nyoman Pandji Tisna. The election had taken place in a meeting of the Paruman Agung on the 28th September 1946 all at once with the transition of the Paruman Agung (the Federation of Kings in Bali) to the Association of Kings in Bali which had the function of an executive body. The legislative body was the new established Paruman Agung (new) which consisted of the representatives of eight Kingdoms and in every autonomy region the Paruman Negara has to come into beeing.

3) Anak Agung Bagus Sutedja was elected as Governor in September 1950. In line with the speed of the democracy process in Bali after the Unitary State has been established on the 17th August 1950 the Provincial Council (DPD) has been formed too. At that time the DPD announced its Decree of the 20th September 1950 No 7/1950 concerning the liquidation of the Paruman Agung, to be replaced by the DPRDS (Temporary DPRD), which was the first Institution to elect a Governor.

4) I Gusti Agung Oka, a Resident in the District Administration (established under the Government Regulation No 21/1950) was appointed as the Governor ad-interim of Bali. That time was the transition period to execute Law No 64/1958 concerning the establishment of Bali region as an autonomy Province including the districts in its regions, together with West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara. His job : a) to establish a legislative body, in this case the DPRD (wihtout S), b) this DPRD has to elect a Governor. This election had resulted in the election of Anak Agung Bagus Sutedja as the Governor of the Province of Bali in December 1959.

5) Anak Agung Bagus Sutedja was re-elected in 1959 and remained in his job until the G 30 S/PKI in 1965. In the frame-work of the guided democracy and the execution of Law no 18/1965 the DPD (as a colleague-

6) I Gusti Putu Merta, diangkat sebagai Pejabat Kepala Daerah Bali setelah G 30 S/PKI, yaitu 18 Desember 1965, sampai dengan tanggal 1 November 1967.
7) I Gusti Ngurah Pinda BA, sebagai wakil Pjs Kepala Daerah Bali, diangkat bersama-sama dengan Pjs Kepala Daerah I Gusti Putu Merta tanggal 18 Desember 1965 sampai dengan 22 Januari 1971.

8) Sukarmen (Kolonel Infantri), Komandan Korem Udayana terpilih oleh DPRD Tingkat I Bali menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 November 1967 (atas dasar Surat Keputusan Presiden 1 November 1965 No 203/1965), menggantikan Pjs Kepala Daerah Merta. Sukarmen didampingi oleh I Gusti Ngurah Pinda BA sebagai Wakil Gubernur sampai berakhir masa jabatannya tanggal 22 Januari '71.

9) Prof Dr Ida Bagus Mantra, terpilih tanggal 28 Juli 1978, atas dasar Surat Keputusan Presiden tanggal 1 Agustus 1978 No 168/M Tahun 1978 menggantikan Sukarmen setelah berakhir 2 masa jabatannya tahun 1978. Setelah berakhir masa jabatannya yang pertama tahun 1983, kini Gubernur Mantra berada dalam jabatannya yang kedua. I Dewa Gede Oka diangkat sebagai Wakil Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Keppres pada tanggal 20 Februari 1985 No 40/M tahun 1985 untuk mendampingi Prof Dr Ida Bagus Mantra dalam masa jabatannya yang kedua.

system) was replaced by the Municipal Executive (Badan Pemerintah Harian, BPH). The Governor was at the same time Chairman of the BPH. With a Presidential Decree on the 18th December 1965 No 380/165 Sutedja had been dismissed as Governor and replaced by IGP Merta as the acting Governor.

6) *I Gusti Putu Merta was appointed as the Acting Governor after the G 30 S/PKI on the 18th December 1965 till the 1st November 1967.*
7) *I Gusti Ngurah Pinda BA as the Vice Acting Governor had been appointed at the same time with I Gusti Putu Merta on the 18th December 1965 till 22th January 1971.*
8) *Sukarmen (an infantry colonel), the former Commandant fo the Udayana Military Area Command (Korem, Komando Resort Militer) had been elected as the Governor of the Province of Bali on the 1st November 1967 (based on a Presidential Decree, 1th November 1965) No 203/1965) replacing the Acting Governor IGP Merta. Until the end of his duty on the 22th January 1971 I Gusti Ngurah remainded on his post as Vice Governor to assist the Governor.*
9) *Prof Dr Ida Bagus Mantra was elected on the 28th July 1978 based on a presidential Decree on the 1th August 1978 No 168/M - 1978 replacing Sukarmen after ending his 2 terms of governorship in 1978. After 1983, nowadays the Governor is in his second term of governorship. I Dewa Gede Oka has been appointed as the Vice Governor of the Province of Bali based on the presidential Decree on the 20th February 1985 No 40/M - 1985 to assist Prof Dr Ida Bagus Mantra in his second term of governorship.*

B A B / *CHAPTER II*

PEMBANGUNAN DAERAH
REGIONAL DEVELOPMENT

PROPINSI Dati I Bali yang terdiri dari pulau Bali, pulau Nusa Penida dan pulau-pulau kecil lainnya, merupakan Propinsi Daerah Tingkat I yang terkecil di Indonesia, karena hanya memiliki daratan seluas 5.632,86 Km^2.

Adapun tujuan pembangunan daerah di Dati I Bali ini adalah sebagaimana halnya di Propinsi-propinsi lainnya, yakni identik dengan tujuan pembangunan nasional. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan potensi Propinsi Dati I Bali serta aspirasi-aspirasi masyarakat Bali sendiri. Berarti dengan terwujudnya tujuan pembangunan daerah akan dapat tercapai dua kepentingan sekaligus, yakni kepentingan daerah dalam kaitannya dengan kepentingan nasional dalam mengisi pembangunan nasional.

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan di Propinsi Dati I Bali serta tetap dapat tercapainya tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan bathin, masyarakat di Propinsi ini, maka mutlak perlu dan tetap terus dipelihara kelestarian lingkungan, melalui pelaksanaan secara bertahap **"Bali Menuju Pulau Taman".** Sebab hanya dengan keadaan lingkungan atau alam yang sesuai dengan kodratNya sajalah umat manusia baik yang sekarang maupun generasi-generasi seterusnya, akan dapat melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-citanya dengan baik dan sempurna.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang tidak dapat dilaksanakan secara serentak dan dalam tempo yang relatif singkat, tetapi haruslah dilaksanakan secara bertahap dan berencana. Hal ini erat kaitannya dengan prioritas-prioritas pembangunan dengan persediaan dana yang terbatas. Sedangkan tiap tahapan pembangunan akan merupakan landasan bagi tahapan pembangunan berikutnya, sehingga tahapan pembangunan selanjutnya dapat dilaksanakan secara lebih mantap Dan dengan demikian diharapkan nantinya masyarakat di Propinsi Dati I Bali tumbuh dan berkembang dengan kekuatannya sendiri.

Jadi kebijaksanaan yang ditempuh dalam periode pembangunan, ialah melanjutkan, memantapkan serta meningkatkan apa yang telah dilaksanakan dan dicapai dalam periode pembangunan sebelumnya. Sedangkan titik berat pembangunannya adalah pada sektor pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata dan sektor industri khususnya industri kerajinan rakyat serta melanjutkan usaha-usaha untuk tetap berswasembada pangan dan meningkatkan sektor industri, terutama yang terkait erat dengan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Dengan meningkatnya hasil-hasil yang dicapai dalam bidang ekonomi, maka akan tersedialah sumber-sumber pembangunan atau dana-dana pembangunan yang lebih luas, guna peningkatan pembangunan dalam berbagai bidang di luar bidang ekonomi.

Untuk lebih memudahkan pelaksanaan pembangunan daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasarannya, dengan memperhatikan kondisi dan potensi di daerah yang tidak sama antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya, kiranya titik berat pelaksanaan pembangunan di seluruh kabupaten di Propinsi Dati I Bali tidaklah mutlak harus sama, sebab hal ini mengandung pemborosan. Oleh karenanya tetap ditempuh strategi pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan sejak Pelita I, II, III bahkan sampai tahun kedua Pelita IV, sebab dapat memberikan hasil-hasil yang cukup memuaskan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan Propinsi Dati I Bali selama ini berusaha agar pelaksanaan "Delapan Sukses" berjalan secara optimal (peningkatan produksi pangan, pelaksanaan Program INPRES, pengembangan dan pembangunan Koperasi, pembinaan kependudukan, Keluarga Berencana dan Transmigrasi, Pemasyarakatan P-4, Pelaksanaan Keppres 14A/1980 jo 18/1981, Pelaksanaan Pertanahan dan Peningkatan Ekspor Non Migas). Dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Delapan Sukses tersebut, telah disusun Wilayah-wilayah Pembangunan di Daerah Bali yang didasarkan pada berbagai pertimbangan, terutama pada potensi ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, yang menjadi ciri-ciri dari dominasi aktivitas pembangunan, sebagai berikut :

1) Wilayah Pembangunan Bali Timur yang meliputi Kabupaten Dati II Karangasem, Bangli dan Klungkung.
   Pusat pertumbuhannya di Klungkung dengan dominasi aktivitas :
   a. pertanian tanaman pangan dan peternakan,
   b. proyeksi lingkungan untuk menciptakan Daerah Kebudayaan yang asli dan lestari, sehingga tetap memiliki daya tarik bagi sektor Pariwisata,
   c. industri dan kerajinan rakyat,
   d. pariwisata.

THE PROVINCE of Bali consisting the island of Bali, the island of Nusa Penida and other small islands with a total land surface of 5,632,86 Km^2 is the smallest Province in Indonesia.

The aim of the regional development in Bali is identical with the aim of the national development and that of the other regions. This development has been adjusted with the condition and potential of the Province of Bali and with the aspiration of its society. This means that the development may fulfill two different interests at the same time, i.e. the interest of the region in relation with the national interest in the fulfilment of the national development.

To safeguard the continuity of development in the Province of Bali and to achieve the aim of the development, i.e. a prosperous and happy society, it is by all means necessary to protect and maintain its environment by means of a step-by-step execution of the "Bali Menuju Pulau Taman" (Bali the Paradise Island) programme.

Only with a beautiful surrounding or a healthy environment the mankind of today as well as the following generations in the future may succeed in the execution of the development to realize their aspirations successfully.

The long term regional development can not be executed all of a sudden or in a very short time, but has to be done step by step in accordance with the plan, taking into consideration the limited amount of the available budget and the priority of development. The first step will be the basic of the following steps of the development with the expectation that the Balinese society will grow and expand with their own power in the future.

So the policy in every stage of the development is to continue, to stabilize and to increase the results of the previous development periods.

Whereas the emphasis of the development is in a broad sense on the agrarian sector, the tourist sector and the industrial sector especially the industry of people's craftmanship and to continue in making efforts to maintain selfsufficiency on food production and to increase the industrial sector, especially those which have a close relationship with the agriculture and tourist sector. With the increase of achievements which have been realized in the economic sector, then the sources and the budget will be available to intensify other development sectors.

For a more convenient execution of the regional development and to achieve its targets taking into consideration the different condition and potential of the region between one District and the other so it is not absolutely necessary to have the same development system in those Districts. This is to avoid an extravagant development. For this reason the policy of development in the region as it was done in the Pelita I, II, III and the second year of Pelita IV will be the same to realize better achievements.

For a fair distribution of the development in the Province of Bali, efforts have been made to execute the "Delapan Sukses" (Eight Success) programme successfully (i.e. the increase of food production, execution of the Inpres programme extension and development of the Co-operatives, promotion of population, family planning and transmigration, dissemination of the P4 in the society, execution of the Keppres 14A/1980 jo 18/1981, execution of the landreform and the increase of Non-oil-and-gas export. In this connection development zones in Bali region have been established based on a variety of considerations especially the economic potential, education and socio-culture, which form the character of the dominant development activities as follows :

1 The development zone of East Bali consists of the Districts of Karangasem, Bangli and Klungkung.
   Its development centre is in Klungkung with the dominant activities in :
   a. Foodstuff Production and Animal Husbandry
   b. Circumference projection to achieve a lasting original cultural zone, so that it maintains its attraction for the tourism sector,
   c. Industry and people's handicraft,
   d. Tourism.

2) The development zone of Central Bali consists of the Districts of Badung and Gianyar.
   Its development centre is in Badung and Gianyar with the dominant activities in :
   a. Foodstuff Production,
   b. Tourism,
   c. Industry and people's handicraft and Foodstuff Processing,
   d. Trade and commerce,
   e. Environment protection to maintain the original image of Bali and its population.

3) The development zone of West Bali consists of the Districts of Tabanan and Jembrana.

2) Wilayah Pembangunan Bali Tengah, meliputi Kabupaten Dati II Badung dan Gianyar, dengan pusat pertumbuhannya di Denpasar, dengan dominasi aktivitas :
   a. pertanian tanaman pangan,
   b. kepariwisataan,
   c. industri dan kerajinan rakyat serta pengolahan bahan makanan,
   d. perdagangan,
   e. proteksi lingkungan, sehingga tetap dapat memperlihatkan citra asli pulau Bali dan penduduk Bali.
3) Wilayah Pembangunan Bali Barat meliputi Kabupaten Dati II Tabanan dan Jembrana. Pusat pertumbuhannya di Nagara dengan dominasi aktivitas :
   a. pertanian, tanaman pangan dan perkebunan,
   b. perikanan,
   c. industri dan kerajinan rakyat, khususnya pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta hasil-hasil lainnya,
   d. pariwisata.
4) Wilayah Pembangunan Bali Utara, yang meliputi Kabupaten Dati II Buleleng, dengan pusat pertumbuhannya di Singaraja, dengan dominasi aktivitas :
   a. pertanian tanaman pangan dan perkebunan,
   b. industri sedang, khususnya pengolahan hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya,
   c. perdagangan,
   d. pariwisata.

Dan untuk lebih memeratakan serta menyelaraskan pembangunan antara Wilayah Pembangunan, antar Kabupaten Dati II dan dalam Kabupaten Dati II itu sendiri, sejalan dengan kebijaksanaan dan arah Pembangunan Daerah disusunlah Sub-sub Wilayah Pembangunan, seperti :

a. Sub Wilayah Pembangunan Daerah Kritis, yang penanggulangannya diprogramkan dan dilaksanakan secara terkoordinasi,
b. Sub Wilayah Pembangunan Sentra-sentra Industri, melalui penentuan industri kerajinan rakyat yang dikembangkan secara bertahap,
c. Sub Wilayah Pembangunan Sentra-sentra Produksi Pertanian dalam arti luas, dengan penentuan sentra produksi pertanian dan dikembangkan secara bertahap,
d. Sub Wilayah Pembangunan Pariwisata, melalui penentuan wilayah-wilayah wisata dan sentra-sentra wisata yang diprogramkan dan dilaksanakan secara terkoordinasi.

Masing-masing disesuaikan dengan ciri khusus ataupun kondisi dan potensi khusus Daerah.

1. Proyek Nasional di Daerah

Pembangunan Daerah dalam rangka pembangunan nasional Indonesia telah dilaksanakan sejak dimulainya Pelita I pada tahun 1969/1970 yang kemudian dilanjutkan dengan Pelita II dan Pelita III. Dalam Repelita IV, Pembangunan di daerah ini secara operasional dituangkan ke dalam sektor-sektor, sub-sub sektor, program-program dan proyek-proyek pembangunan yang lebih konkrit setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBN), proyek-proyek Sektoral dan proyek-proyek Inpres yang merupakan unsur pokok dari rencana tahunan.

Dengan memperhatikan asas demokrasi ekonomi dan dalam rangka menciptakan kerangka landasan pembangunan jangka panjang, peran serta masyarakat dan kegiatan-kegiatan dunia usaha sementara didorong, sehingga saling menunjan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peran serta dimaksud diharapkan dapat merangsang dunia usaha melalui berbagai kebijaksanaan yang telah digariskan, baik yang bersifat khusus untuk Daerah Bali maupun yang bersifat nasional, sepeti penentuan skala prioritas, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya.

Biaya pembangunan daerah yang berasal dari APBN Sektoral selama dimulainya Pelita I hingga Pelita III mengalami kenaikan yang cukup besar, yakni dari Rp 1.050.470.000,00 meningkat sampai Rp 19.970.845.660,00 dan pada akhir Pelita III mencapai Rp 42.030.723.150,00. Lihat Tabel II-1.

Dalam Repelita III Daerah, direncanakan keperluan investasi secara keseluruhan sebesar Rp 503,214 milyar namun dalam pelaksanaannya telah terjadi investasi secara keseluruhan sebesar Rp 725,365 milyar, yang terdiri dari investasi sektor Pemerintah sebesar Rp 370,836 milyar atau ± 51% dan dari sektor dunia usaha dan swadaya masyarakat sebesar Rp 354.527 milyar atau ± 49%. Sebagai prosentase terhadap PDRB, jumlah investasi yang terjadi selama Pelita III rata-rata sebesar 23,94%.

Dengan menggunakan rata-rata laju pertumbuhan sektoral yang diperkirakan akan terjadi selama Repelita IV, masing-masing sektor dapat diproyeksikan, sehingga didapat perkiraan PDRB Propinsi Dati

Its development centre is in Negara with the dominant activities in :
a. Agriculture, foodstuff production and plantation,
b. Fishery,
c. Industry and people's handicraft, especially foodstuff and fish-processing and others,
d. Tourism,

4) The development zone of North Bali consists of the Districts of Buleleng with its development centre in Buleleng. Its dominant activities are :
a. Foodstuff production and plantation,
b. Light industry, especially the processing of foodstuff and other products,
c. Trade and Commerce.
d. Tourism.

To synchronize and to equalize the development between the development zones in all the district regions and inside its own district and in line with the policy of the regional development sub-development zones have been established :

a. the Sub-development zone of Kritin region which establishment has been programmed and its execution has been co-ordinated,
b. the Sub-development zone of the industrial centres with a given art of the people's handicraft industry which has been extended in stages.
c. the Sub-development zone of the agriculture production centres in a broad sense with a given foodstuff production centre which has been extended in stages,
d. the Sub-development zone of tourism with a programmed tourist area and centers and which execution has been co-ordinated.

Every Sub-development zone has been synchronized with the unique character or condition and potential of a specific region.

1. The National Project in the Region

The regional develcoment in the framework of the Indonesian national development has been executed since the Pelita I in 1969/1970 and afterward has been extended with Pelita II and Pelita III. In the planning of Pelita IV (the Repelita IV) is decided that the regional development has to be executed in sectors, sub-sectors, concrete development programmes and projects which have to be stated in the yearly regional budget and expenditure (APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) estimation, sectoral projects and Inpres projects which are the basic items of the yearly plan.

Taking into consideration the principle of the economic democracy and in the framework of the long-term development base, the participation of the society and the trade and commerce business has to be motivated so that it backs up the Government development activities.

The above mentioned participation has the aim to motivate trade and commerce business in accordance with the government policy in the Bali region as well as in the other parts of the country in line with the scale of priority, financial and fiscal policy and other policies.

The regional development expenditure from the APBN (the national budget and expenses) budget since Pelita I till Pelita III has increased substantially, i.e. from Rp1,050,470,000.00 up to Rp19,970,845,660.00 and at the end of Pelita III has reached an amount of Rp42,030,723,150.00 (See Table II-1).

*In the Regional **Repelita III** a total investment of Rp503,214 billion was required, but in the execution a total investment of Rp725,365 billion had taken place which consisted of Rp370,836 billion from the Government sector or 51% and Rp354,527 billion from the business and auto-activity of the society or ± 49%. The ratio in percentage of the total investment which had been made during the Pelita III against the PDRB is about 23.94%.*

Tabel / *Table II — 1*

PERKEMBANGAN DANA—DANA PELITA NASIONAL/SEKTORAL PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
INCREASE OF PELITA NATIONAL/SECTORAL BUDGET IN THE PROVINCE OF BALI

		PELITA I		
1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972/1973	1973/1974
1.050.470.000	1.099.217.205	2.058.631.375	3.028.639.179	3.598.598.187
		PELITA II		
1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1978/1979
5.518.863.783	7.968.736.826	10.756.765.802	13.404.337.516	15.702.295.220
		PELITA III		
1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
19.970.845.660	34.568.062.750	41.483.859.640	47.736.342.770	42.030.723.150

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

I Bali (atas dasar harga konstan 1975) sebesar Rp 2.170.601 milyar atau sebesar Rp 6.615.264 milyar atas dasar harga berlaku.

PDRB tersebut dilihat dari segi penggunaannya selama Pelita IV digunakan untuk konsumsi rumah tangga 77,49%, untuk konsumsi pemerintah atau biaya penyelenggaraan pemerintah 17,15%, untuk pembentukan modal atau investasi 18,42%, untuk penggunaan di luar wilayah termasuk ekspor 31,28% dan produk yang berasal dari luar wilayah termasuk impor sekitar 44,34%.

Dengan demikian selama Repelita IV menurut perkiraan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebesar 17,15% dari PDRB atau sekitar Rp 1.134,450 milyar. Sedangkan untuk dapat mewujudkan laju pertumbuhan PDRB sebesar 6% diperlukan investasi sebesar 18,42% dari PDRB atau sebesar Rp1.218,629 milyar. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 6% setahun, maka dalam Repelita IV investasi di Daerah Bali diperkirakann meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 15% per tahun, sehingga tercapai rata-rata investasi sebesar 18,42%.

Dari jumlah investasi tersebut 45%, atau Rp 546,877 milyar dilaksanakan oleh Pemerintah melalui proyek-proyek sektoral (APBN), Inpres-Inpres, APBD Tingkat I dan Tingkat II, sedangkan 55% diharapkan partisipasi dari sektor dunia usaha dan swadaya masyarakat yang dapat memobilisasi dana-dananya untuk melaksanakan investasi selama Repelita IV. Dengan demikian akan terjadi peningkatan peranan swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan.

Investasi pemerintah pada tahun pertama Pelita IV berjumlah Rp 79,767 milyar yang terdiri dari investasi dalam wujud pembiayaan proyek-proyek sektoral (APBN) sebesar Rp 43,074 milyar, Inpres-Inpres sebesar Rp 20,739 milyar, APBD Tingkat I sebesar Rp 10,370 milyar dan APBD Tingkat II dari seluruh Kabupaten Bali sebesar Rp 5,584 milyar.

Investasi dari sektor pemerintah tersebut dialokasikan kepada pelbagai sektor, sub sektor dan program pembangunan sesuai dengan skala prioritas yang telah digariskan dalam GBHN maupun dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali. Lihat Tabel II-2.

2. Inpres Daerah Tingkat I Bali

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Bali ditentukan bahwa prioritas pembangunan Daerah tersebut adalah sektor Pertanian dalam arti luas, sub sektor Pariwisata yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali dan sub sektor industri Kerajinan.

Pembangunan sektor Pertanian dalam arti luas untuk periode Pelita IV terus ditingkatkan guna memenuhi keperluan pangan, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja. Untuk mencapai sasaran dimaksud akan dilakukan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi secara terpadu meliputi komoditi padi, palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Sedangkan dalam sektor industri, pembangunan akan diarahkan untuk mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, disamping untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekspor serta meningkatkan pendapatan khususnya bagi pengusaha kerajinan rumah tangga.

Dalam Pelita IV pembangunan di bidang industri ini akan diarahkan untuk mengembankan dan meningkatkan industri sedang, industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sedangkan jenis-jenis industri dalam pembangunanya diarahkan pada industri yang menunjang sektor Pertanian seperti industri yang menghasilkan alat dan sarana produksi pertanian serta industri yang mengolah hasil pertanian, disamping pembangunan industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang mendukung sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya.

Kemudian dalam sub sektor Pariwisata pembangunannya akan ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan devisa dengan tetap mempertahankan terpeliharanya kebudayaan daerah, kepribadian daerah serta kelestarian lingkungan hidup.

Dengan adanya sasaran yang merupakan prioritas pembangunan daerah ini, berarti program pembangunan Dati I Bali juga melengkapi dan mendukung program pembangunan/Pelita Nasional. Sedangkan sumber pembiayaannya untuk APBD Tingkat I dalam garis besarnya terdiri dari penerimaan yang diterima dari negara (Pemerintah Pusat), penerimaan asli Daerah sendiri dan Tabungan Pemerintah Daerah.

Penerimaan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan terdiri dari a) bea pemeriksanaan ternak, hasil bumi dan barang-barang kesenian, b) retribusi atas izin penggunaan jalan umum oleh kendaraan bermotor, c) dana wajib pembangunan daerah atas izin prinsip membangun hotel, d) dana pembangunan daerah atas izin kerja, e) retribusi atas izin penyimpanan bahan bakar, dan f) penerimaan lain-lain.

With the utilization of the average sectoral development which has been assumed to take place during Repelita IV every sector can be projected, so that the estimlation of the PDRB in the Province of Bali (on constant market prices in 1975) will be Rp2,170.601 billion or Rp6,615.264 billion on current market prices.

This PDRB as observed from the point of its expenses during Pelita IV is as follows : family-victuals 77.49%, Administration consumptions 17.15%, investment 18.42%, expenses outside the region including export 31,28% and for products coming from outside the region including import about 44.34%.

Thus in accordance with the estimation, the budget required from the PDRB for the Administration during Repelita IV is 17.15% or about Rp1,134.450 billion. Whereas to realize the 6% rate of growth of the PDRB, an investment of 18.42% from the PDRB or Rp1,218.629 billion is required. To realize the economic rate of growth of about 6% per year then the investment in Bali during Repelita IV has been assumed to have a growth rate of about 15% per year so that an investment of about 18.24% can be reached.

From this investment, 45% or Rp546,877 billion has been realized by the government via the sectoral projects, the Inpres, the APBD of the Province and the Districts, whereas 55% is expected from the business and auto-activity of the society which can mobilize all the funds to realize the investment during Repelita IV. Thus an increase of the auto-active role of the society and business sector will be created to support the budget of development. See Table II-2.

Investment from the Government sector is allocated to the different sectors, sub-sectors and development programmes in accordance with the scale of priority as has been expressed in the Guidelines of the State Policy (GBHN, Garis-garis Besar Haluan Negara) as well as in the Basic Design of the Regional Development (PDPD, Pola Dasar Pembangunan Daerah) of Bali.

Tabel / *Table II — 2*

PERKIRAAN PEMBIAYAAN PELITA IV DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
BUDGET ESTIMATION OF PELITA IV IN THE REGIONS OF THE PROVINCE BALI

NO	SEKTOR / *Sector*	APBN 1984/85	1984/1985 s/d 1988/89
1.	Pertanian dan Pengairan *Agriculture and irrigation*	8.972.314.200	61.513.906.200
2.	Industri / *Industry*	366.129.000	2.510.169.000
3.	Pertambangan dan Energi *Mining and Energy*	2.412.144.000	16.537.584.000
4.	Perhubungan dan Pariwisata *Communication and Tourism*	4.535.692.200	31.096.564.200
5.	Perdagangan dan Koperasi *Trade and Commerce and Cooperatives*	783.946.800	5.374.714.800
6.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi *Manpower resources and Transmigration*	3.450.227.400	23.654.654.400
7.	Pembangunan Daerah, Desa dan Kota *Development of Region, Village, City*	1.477.438.200	10.129.270.200
8.	Agama / *Religion*	288.595.800	1.978.603.800
9.	Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa *Education of the Younger Generation, National Culture Promotion and Belief in One Almighty*	8.364.970.800	57.349.978.800
10.	Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita Kependudukan dan Keluarga Berencana *Social Welfare, Women's Role, Population and Family Planning*	4.333.244.400	29.708.588.400
11.	Perumahan Rakyat dan Pemukiman *Housing and Settlements*	1.645.426.800	11.280.994.800
12.	Hukum / *Legal Affairs*	1.727.267.400	11.842.091.400
13.	Penerangan Pers dan Komunikasi Sosial *Press, Information and Social Communication*	551.347.200	3.780.019.200
14.	Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian *Science, Technology and Research*	697.798.800	4.784.086.800
15.	Aparatur Pemerintah *State Apparatus*	1.111.309.200	7.619.101.200
16.	Sumber Alam dan Lingkungan Hidup *Natural Resources and Living Environ*	2.356.147 800	16.153.675.800
	Jumlah / *Total*	43.074 000.000	295.314.000.000

Adapun APBN Tingkat I Bali pada awal Pelita I sebesar Rp 183.244.938,00, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga pada akhir Pelita I hanya sebesar Rp 68.479.426,00. Tetapi kemudian dalam Pelita II tahun pertama meningkat lagi menjadi Rp 916.836.550,00, demikian juga halnya dengan keadaan APBD Tingkat I pada masa Pelita III. Lihat Tabel II-3.

Kemudian pada awal Repelita IV APBD Tingkat I Bali mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan tahun terakhir Pelita III, yakni dari Rp 10.454.500.000,00, menjadi Rp 10.370.000.000,00. Dan sampai akhir Repelita IV diperkirakan sebesar Rp 71.094.000.000,00.

Alokasi dana untuk pembangunan Dati I Bali dari Inpres Dati I berkembang secara nyata sejak Pelita I, perkembangan tersebut erat kaitannya dengan tingkat keperluan pembangunan Daerah Bali. Disamping itu perkembangan Inpres ini dimaksudkan untuk merangsang swadaya masyarakat agar terus berpartisipasi dalam pembangunan di daerah Bali sendiri, yang berarti juga turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dana Inpres untuk Dati I Bali ini pada awal Pelita I sekitar Rp 560.000.000,- tetapi dalam tahun kedua terjadi penurunan yang drastis sekali yaitu sekitar 64,7%. Kemudian dalam tahun ketiga dan keempat meningkat lagi, walaupun tidak sebesar dana awal Pelita I. Sedangkan pada tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup memuaskan, yakni hampir tiga kali dana pada tahun keempat, bahkan melebihi dana pada awal Pelita I.

Berbeda keadaannya dengan Pelita I, maka dalam periode Pelita II dana Inpres untuk Dati I Bali mengalami kemajuan yang sangat pesat, karena jika dilihat dari awal Pelita II hingga tahun terakhirnya, hampir mencapai delapan kali. Lebih-lebih jika dibandingkan dengan dana Inpres pada awal Pelita I. Demikian pula halnya dengan keadaan dana Inpres pada masa Pelita III, dimana dalam tahun terakhir Pelita III sudah mencapai Rp29.838.284.500,00. Lihat Tabel II-4.

Tabel / *Table II — 3*

PERKEMBANGAN DANA—DANA APBD TINGKAT I BALI
THE DEVELOPMENT OF THE APBD FUNDS IN THE PROVINCE OF BALI

		PELITA I		
1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972/1973	1973/1974
183.244.938	202.064.645	151.716.603	107.789.895	68.748.426
		PELITA II		
1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1978/1979
916.836.550	1.327.000.000	1.947.194.000	2.194.318.000	2.739.160.000
		PELITA III		
1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
3.555.000.000	6.844.015.000	10.000.885.250	10.290.000.000	10.454.500.000

Sumber BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

3. Bantuan Inpres Dati II

Propinsi Daerah Tingkat I Bali secara administratif dibagi menjadi 8 Kabupaten, yaitu Kabupaten Dati II Badung, Kabupaten Dati II Tabanan, Kabupaten Dati II Jembrana, Kabupaten Dati II Buleleng, Kabupaten Dati II Klungkung, Kabupaten Dati II Bungli, Kabupaten Dati II Gianyar dan Kabupaten Dati II Karangasem.

Tabel / *Table II — 4*

		PELITA I		
1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972/1973	1973/1974
560.000.000	197.605.300	231.725.000	287.600.000	683.770.440
		PELITA II		
1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1978/1979
1.219.645.000	3.394.519.000	4.604.466.000	6.988.274.000	8.222.982.000
		PELITA III		
1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
8,960,035,000	17.344.916.000	22.082.407.000	31.752.510.000	29.838.284.000

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

2. Inpres-Aid for Provincial Development Projects

*In the **PDPD** Bali is specified that the priority of development in the region is the agricultural sector in a broad sense, the tourism sub-sector based on the cultural promotion in Bali and the handicraft industrial sub-sector.*

The development of the agricultural sector in a broad sense for the Pelita IV has been continuously intensified to fulfill the needs for food, to expand export, to increase farmer's income and to extend work opportunities. To achieve those targets intensification, extensification, diversification and a coordinated rehabilitation of rice commodities, palawija, horticulture, plantation, animal husbandry and fishery shall be carried out.

Whereas the development in the industrial sector shall be aimed to speed up the creation of a better balanced economic struture and, besides to expand job opportunities, to increase export and to increase income especially for the employers in family's handicraft industry.

During Pelita IV the development of industrial sector shall be aimed to expand and to intensify the moderate industry, the light industry and family's handicraft industry. Whereas the development of all kind of industries will be aimed to the industry which supports the agricultural sector like the industry which produces tools and accessories for the agricultural production and the industry which manufactures the agricultural products, besides the development of light industry and the family's handicraft industry which support tourism and other sectors.

The development of Tourism sub-sector shall be intensified to expand the work and business opportunities, to increase foreign exchange without sacrificing the regional culture, the regional identity and the preserving of the environment.

With this target, which is a priority of the regional development, the development programme of the Province of Bali has participated in filling up and supporting the National Development Programme I Pelita. The budget for the provincial APBD consists of receipt from the State (the Central Administration) and pure-revenue from its own region and from the Regional Administration's savings.

The pure regional revenue for the development's budget consists of : a) Tax for the inspection of animals, agricultural products and art products, b) retribution or permits for the use of public roads by motor vehicles, c) obliged development funds base on the principle to establish a hotel, d) regional development funds on work-permits, e) retribution on fuel deposit permits and f) other incomes.

The APBD of the Province of Bali at the beginning of Pelita I was Rp183,244,938,00 but decreased in the following years till only Rp68,479,426,00 at the end of Pelita I. Afterward in the beginning of Pelita II it increased again to Rp916,836,550,00 and it happened again with the regional APBD budget situation in the Pelita III.

The development of the APBD of the Province of Bali during the Pelita I - III periods can be observed in Table II-3.

At the beginning of Repelita IV the APBD of the Province of Bali decreased if compared with the end of Pelita III, i.e. from Rp10,454,500,000,00 to Rp10,370,000,000,00. And up to the end of Repelita IV it will be about Rp71,094,000,000,00.

The allocation of funds for the development of the Province of Bali from Inpres Dati I has expanded since the Pelita I as a result of the stage of development requirements. Beside that, the expansion of this Inpres has the aim to stimulate the auto-activity of the society to continue its participation in the development of its own region. And this means a participation in the National development programme too.

The Inpres fund for Dati I Bali at the beginning of Pelita I was about Rp560,000,000 but at the second year it decreased drastically with about 64.7%. Then, in the third and fourth year it increased again though not as big as the fund at the beginning of Pelita I. Whereas at the final year the increase was very rewarding, i.e. nearly three times of the fund in the fourth year, even more than the fund at the beginning of Pelita I.

In comparison with the Pelita I the Inpres-Aid for Dati I Bali in the period of Pelita II had made a very big progress. From the beginning till the end of Pelita II the budget had increased nearly eight times and even more if compared with the Inpres fund at the beginning of Pelita I. This too was the case with the Inpres fund situation in the period of Pelita III, in which at its final year it reached an amount of Rp29,838,284,500.00.

The expansion of the Inpres fund for Dati I Bali since Pelita I untill Pelita III can be seen on Table II-4.

3. Inpres-Aid for District development Projects

The Province of Dati I Bali administratively consists of eight Districts, i.e. the District of Dati II Badung, the District of Dati II Tabanan, the District of Dati II Jembrana, the District of Dati II Buleleng, the District of Dati II Klungkung, the District of Dati II Bangli, the District of Dati II Gianyar and the District of Dati II Karangasem.

Dari keseluruhan Daerah Tingkat II tersebut, anggaran pembangunan yang berasal dari APBD Tingkat II sejak Pelita I, II dan Pelita III mengalami peningkatan/kemajuan yang pesat sekali, terutama dalam periode Pelita II, mencapai Rp 2.273.566.000,00. Namun jika dilihat tahun demi tahun, maka pada masa Pelita I dari tahun pertama terjadi penurunan sekitar 21,28% dan pada tahun ketiga hampir 50%. Tetapi kemudian dalam tahun keempat dan tahun terakhir Pelita I meningkat lagi, walaupun peningkatan itu jika dibandingkan dengan APBD Tingkat II di awal Pelita I masih lebih rendah besarnya.

Jadi selama Pelita I anggaran pembangunan Daerah Bali baik untuk APBD Tingkat I maupun APBD Tingkat II-nya mengalami penurunan.

Demikian juga halnya dengan tahun-tahun pada periode Pelita III, dimana dalam tahun pertamanya terjadi peningkatan, jika dibandingkan dengan akhir Pelita II. Tetapi kemudian dalam tahun keduanya mengalami penurunan sekitar 28% dan tahun keempat meningkat lagi hingga mencapai dua kali lipat lebih, dalam tahun kelima Pelita III APBD Tingkat II ini menurun kembali sekitar 15% yakni dari Rp 6.433.243.000,00 menjadi Rp 5.461.401.493,75,- Perkembangan Dana-dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II sejak Pelita I hingga Pelita III. Lihat Tabel II-5.

Mengenai dana Inpres yang dialokasikan sampai tahun keempat Repelita III setiap tahunnya mengalami peningkatan pula. Sedangkan mengenai realisasi pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun keempat Pelita III adalah sebagai berikut : Program bantuan 1979/1980 realisasi fisik maupun keuangannya telah selesai 100%, program bantuan 1980/1981 realisasi fisik maupun keuangannya pun selesai 100%, demikian juga dengan realisasi fisik dan keuangan pada tahun 1981/1982.

Sedangkan program bantuan pada tahun 1982/1983 realisasi fisiknya mencapai 88,23% dan realisasi keuangannya sekitar 82,93%.

Adapun hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah Tingkat II ini antara lain; a) peralatan yang dimiliki terbatas dan tidak seimbang dengan volume pekerjaan, b) kurangnya tenaga teknis dan administrasi, c) terlambatnya droping aspal. Meskipun demikian hambatan-hambatan yang dijumpai tersebut tidaklah merupakan masalah yang prinsipil, dalam arti bahwa pelaksanaan proyek tetap berjalan walaupun tidak secepat yang diharapkan.

4. Inpres-Inpres lainnya

Bantuan Inpres Sekolah Dasar dalam pelaksanaannya diarahkan untuk pembangunan gedung baru, penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan ruang kelas, pembangunan rumah Dinas Kepala Sekolah dan penjaga sekolah serta pembangunan rumah dinas guru.

Perkembangan jumlah dana yang dialokasikan untuk Inpres Sekolah Dasar di Bali pada Tahun Anggaran 1979/1980 berjumlah Rp 2.032.190.000,- kemudian tahun anggaran berikutnya mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 7.775.275.000. Akan tetapi pada tahun 1981/1982 terjadi penurunan sehingga dana tersebut hanya sebesar Rp5.216.783.000,- Pada tahun 1982/1983 dana Inpres SD ini mengalami peningkatan yang besar sekali jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, hampir mencapai tiga kali lipat yakni sebesar Rp 13.139.332.000,- Dan pada tahun terakhir Pelita III dananya menurun kembali menjadi Rp 12.404.736.000,-

Dari jumlah dana yang dialokasikan untuk Inpres SD, maka pelaksanaan program bantuan tersebut dapat diketahui sebagai berikut; dari tahun pertama sampai denga tahun kedua Pelita III program bantuannya telah selesai 100%, kemudian dalam tahun ketiga selesai ± 90% dan pada tahun keempat Pelita III program bantuan tersebut mencapai sasaran fisik sekitar 75,29%.

Program bantuan sarana kesehatan pelaksanaannya diarahkan untuk beberapa hal, antara lain; a) untuk pembangunan Puskesmas baru, b) perbaikan serta perluasan Puskesmas, c) pembangunan dan perbaikan Puskesmas Pembantu, d) pembangunan rumah dokter, e) pembangunan/perbaikan rumah tenaga paramedis, f) pengadaan sarana, seperti sepeda, g) pembangunan sarana air minum dan prasarana kesehatan lingkungan serta, h) pengadaan obat-obatan.

Adapun dana bantuan sarana kesehatan ini dapat dilihat sebagai berikut : Tahun 1979/1980 sebesar Rp 552.341.000,- kemudian tahun 1980/1981 ada kenaikan sebesar 50% sehingga dananya mencapai Rp 727.036.000,-. Pada tahun berikutnya kenaikan yang terjadi sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 1.289.899.000,-. Pada tahun 1982/1983 juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 1.615.879.000,-. Tetapi pada tahun terakhir Pelita III terlihat ada penurunan, walaupun hanya sedikit sekali, sehingga dananya pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 1.611.692.000,-

Dari dana yang dialokasikan untuk pembangunan sarana kesehatan, realisasi fisiknya sampai tahun terakhir Pelita III selesai 100%. Sedangkan program bantuan 1980/1981 sarana fisik sampai akhir September 1982

Since the Pelita I, II and III the development budget originating from the APBD of the District in all the Dati II as mentioned above had made big progress, especially in the period of Pelita II which was Rp2,273,566,000.00.

Nevertheless a review on Pelita I shows that there was a decrease by 21,28% after the first year and nearly 50% in the third year. Then, in the fourth and final year of Pelita I it increased again, though this addition if compared with the district APBD at the beginning of Pelita I is still much lower.

The same case happened with the years in the period of Pelita III, in which in its first year the budget increased if compared with the end of Pelita II. Afterward in the second year the budget decreased about 28%. In the fourth year it increased again two times of the earlier budget. In the fifth year of Pelita III the district APBD decreased again about 15%, i.e. from Rp6,433,243,000.00 to Rp5,461,401,493.75.

The development of district APBD budgets since the Pelita I until Pelita III can be seen in Table II-5.

Until the fourth year of Repelita III the allocated Inpres fund per year had increased. The realization of its execution till end end of the fourth year of Pelita III is as follows : The physical and financial realization of the Aid programme 1979/1980, 1980/1981 and 1981/1982 had been executed by 100%.

Tabel / ***Table II — 5***

PELITA I				
1969/1970	1970/1971	1971/1972	1972/1973	1973/1974
130.755.000	112.953.000	67:689.036	73.360.063	90.959.477
PELITA II				
1974/1975	1975/1976	976/1977	1977/1978	1978/1979
841.337.360	994.709.639	1.221.760.845	1.593.756.785	2.273.566.000
PELITA III				
1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
2.258.559.435,09	2.327.175.500	3.012.883.300	6.433.243.000	5.461.401.493,75

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

Whereas the physical realization of the aid program in 1982/1983 reached 88,23% and the financial part about 82,93%. There were some hampering factors during the execution of the development programme in Dati II such as : a) not enough available working tools to do the job properly, b) lack of technical and Administration experts, c) delay in the supply of asphalt. Those hamperings are not a principle problem but the execution of the projects became slower.

4. Other Inpres-Aids

The execution of the Inpres-Aid for primary schools (Sekolah Dasar) has been aimed to establish new buildings, to make available clean water facilities, to build class rooms, to build houses for the Head of school-master and the school guard and to build government official's houses for the teachers.

The expansion of the amount of funds allocated to the "Inpres" Primary Schools in Bali in the fiscal year 1979/1980 was Rp2,032,190,000,- and in the next fiscal year increased to Rp7,775,275,000,-. But in 1981/1982 it decreased to only Rp5,216,783,000,-. In 1982/1983 this funds in comparison with the earlier fiscal year increased nearly three times with an amount of Rp13,139,332,000,-. At the final year of Pelita III it decreased again to Rp12,404,736,000,-.

The execution of the programme with the funds allocated to the Inpres primary school can be observed as follows : 100% of the Aid programme had been finished from the first till the second year of Pelita III, ± 90% in the third year and about 75,29% in the fourth year.

The execution of the Aid programme for Health Facilities has been aimed to several items : a) establishment of new Public Health Centres, b) rehabilitation and expanding of the existing Public Health Centres, c) rehabilitation and expanding of the Auxiliary Public Health Centres, d) establishment of doctors's residents, e) rehabilitation and establishment of paramedic houses, f) provision of facilities, for example bicycles, g) establishment of drink-water facilities and cultivation of healthy milieu and h) supply of medicine.

The specification of this health facilities funds is as follows : 1979/1980 an amount of Rp552,341,000 and in 1980/1981 an increase by 50% to the amount of Rp727,036,000,-. In the next year an increase of two times

mencapai 90% kemudian tahun anggaran berikutnya sarana fisik sampai akhir November 1982 hanya tercapai 84,40% dan pada tahun 1982/1983 realisasi fisik sampai akhir Maret 1982 mencapai 74,06%.

Disamping program bantuan untuk Inpres SD, untuk sarana kesehatan, juga ada program bantuan Penunjang Jalan. Program bantuan dimaksud adalah program bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten di Bali. Penggunaannya diarahkan untuk kegiatan penunjang jalan, seperti pengerasan dan pengkrikilan jalan-jalan Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali.

Realisasi fisik yang dapat dicapai selama periode empat tahun Pelita III untuk masing-masing tahun anggaran adalah sebagai berikut : Sasaran fisik untuk tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan tahun terakhir Pelita III selesai 100%, walaupun untuk tahun anggaran 1981/1982 sampai bulan November 1982 rata-rata 99,05% dan tahun angggaran berikutnya mencapai 89,05%.

5. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah dan merupakan suatu usaha yang terpadu antara kegiatan partisipasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pemerintah (sektoral dan pemerintah daerah) dalam suatu mekanisme yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Disamping itu pembangunan Desa dititik beratkan pada adanya keseimbangan perkembangan dengan sektor perkotaan, yang nantinya diharapkan antara Pembangunan Desa dan Kota terarah pada keselarasan dalam pertumbuhannya.

Dengan sendirinya program bantuan Pembangunan Desa pun ditujukan untuk; menggerakkan, meningkatan dan mengarahkan usaha swadaya gotong-royong masyarakat dan membantu Desa dalam melaksanakan pembangunan yang bahan-bahannya tidak terdapat di Desa. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek prasarana pemasaran dalam lingkungan Desa dan pembangunan proyek-proyek prasarana sosial di pedesaan.
Lihat Tabel II-6.

Sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan di desa selama ini, maka keadaan 594 desa di Bali sampai dengan akhir tahun 1983/1984; Desa Swakarya di Dati I Bali masih ada 42,76% atau sekitar 254 desa, sedangkan sisanya 57,24% atau 340 Desa sudah merupakan Desa Swasembada.

Jadi Desa di Bali yang perlu dikembangkan secara terpadu dengan sumber dana dari masyarakat sendiri, sektoral, Inpres dan dari APBD masih ada sekitar 254 Desa. Adapun klasifikasi Desa/Kelurahan di Propinsi Dati I Bali tahun 1983/1984. Lihat Tabel II-7.

Struktur perekonomian masyarakat Desa di Bali membawa akibat terhadap tingkat pendidikan di desa, dimana dari jumlah 594 desa, masih kurang pendidikannya sekitar 250 desa (33,96%) dan yang tingkat pendidikannya sedang ada sekitar 270 desa (45,84%).

Dalam rangka Pembangunan Desa, maka partisipasi masyarakat digerakkan melalui pembinaan usaha gotong-royong, yang meliputi penyuluhan pembangunan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa. Pada tahun 1983/1984 Pemerintah Daerah Tingkat I Bali mendidik sebanyak 270 Kader Pembangunan Desa di 9 Kecamatan serta dilaksanakan pembinaan KPD di 7 Kecamatan di Kabupaten Tabanan, Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Juga diberikan bantuan stimulan LKMD kepada 8 Desa, masing-masing sebesar Rp 100.000,- per Desa, sedangkan jumlah LKMD yang terdapat di Dati I Bali ada sebanyak 594 buah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat desa dilakukan bimbingan terhadap usaha perekonomian desa. Bimbingan usaha perekonomian dimaksud selama tahun 1983/1984 berupa pemberian bantuan sebesar Rp 1.400.000,- kepada Desa Dawan Klod untuk pengadaan usaha industri komporisasi gula aren, juga kepada desa Kukuh sejumlah Rp 600.000,- untuk usaha peternakan sepi.

Dalam tahun yang sama diberikan pula bantuan-bantuan lainnya antara lain; pelaksanaan penyuluhan teknis dan pengadaan peralatan kepada 8 desa di Bali masing-masing sebesar Rp 120.000,- per desa; kemudian pemugaran rumah sebanyak 520 buah dengan biaya sebesar Rp 33.280.000,- yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

Sasaran program pembangunan Desa dilakukan terus menerus melalui perkembangan Desa Swadaya (tradisional) ke Desa Swakarya (peralihan) menuju pada Desa Swasembada (berkembang), yang lebih lanjut akan menuju ke Desa Pancasila.

Adapun usaha-usaha pengembangan yang dilakukan selama tahun terakhir Pelita III adalah survey tata desa di 2 kecamatan UDKP yaitu Ubud dan Petang (Badung) dan menyelenggarakan lomba desa.

of the earlier year up to Rp1,289,899,000.- In 1982/1983 an increase again to Rp1,615,879,000,-. In the final year of Pelita III a small decrease to Rp1,611,692,000,-.
The physical realization of the funds allocated to the development health facilities until the final year of Pelita III was 100%. Whereas the aid programme of 1980/1981 up to the end of September 1981 reached 90% for its physical execution. In the next fiscal year until November 1982 it reached only 84,40% and in 1982/1983 until the end of March 1983 74,06%.

Beside the aid programme for Inpres Primary Schools and for health facilities there is also an aid programme for Roads Embetterment. This programme has been allocated to the eight Districts in Bali. The use of it has been aimed to rehabilate roads, so as to harden and to cover with gravel those roads in the Districts of Bali.

The physical realization during the period of four years of Pelita III in every fiscal year is as follows : In the fiscal year 1979/1980 until the final year of Pelita III it was finished 100%. In the fiscal year 1981/1982 until November 1982 however, it came to an average of 99,05% and in the next year to 89,05%.

5. Rural Development

Rural development is a development effort of the society in the lowest administration unit. It is a coordinated effort between the participation activities of the society and those of the Government (sectoral and regional administration) in one exact mechanism to promote welfare of the society in the villages.

The Rural Development has been stressed to be in balance with the development in the cities so that in the future both of them can be aimed to create harmony in their growth.

In stands to reason that the aid programme of the Rural Development also has the aim to activate, intensify and to guide the efforts of a cooperative auto-activity of the society and to support the development with the supply of materials which are not available in the villages. The execution of this programme has the aim to finance the establishment of marketing and social facilities in rural areas.

The allocation of funds from the aid programme in Bali during Repelita III and its activities can be seen in Table II-6.

The condition of 594 villages in Bali until the end of 1983/1984 as a result of the execution of various development activities so far is as follows : 42,76% or about 254 villages in Dati I Bali were still self-activity Villages, whereas the remaining 57,24% or 340 villages belonged already to the self-sufficient Villages.

Thus the number of villages which have to be developed in coordination with each other by using the funds of the Villages society and the sectoral, Inpres and APBD budget still remain about 254 Villages. The classification of Villages/Kelurahan in the Province of Dati I Bali in 1983/1984 can be seen on Table II-7.

The economic structure of the rural society in Bali has affected the stage of education in the rural area, in which about 250 Villages out of the 594 Villages (33,96%) have too few education and about 270 Villages (45,84%) have an average level.

In the framework of Village Development the participation of the society has to be mobilized with cooperative efforts promotion which consists of information about development and intensifying of education and skill.

In 1983/1984 the Regional Administration Dati I Bali trained 270 Village Development Cadres in 9 sub-districts and gave guidance to those Cadres in 7 sub-districts in the Districts of Tabanan, Buleleng and Jembrana.

Stimulate-Aid has also been given to the Rural Community Resilience Institution (LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) in 8 Villages. Each Village receives Rp100,000,-, whereas the total number of LKMD in Dati I Bali are 594 Institutions.

In the framework to increase the income of the village society and to expand the work opportunities guidance has been given on the villag economic efforts. The support in guidance in 1983/1984 for the Villages Dawan Klod was Rp1,400,000,- to establish an industrial undertaking in "komporisasi" (the introduction of furnaces in brickyards) of palm sugar (gula aren), and an amount of Rp600,000,- for the village to establish Cattle Husbandry.

In the same year aids was also given to the other sectors : to give technical guidance and working tools to 8 Villages in Bali in the amount of Rp120,000,- per Village, next to rehabilitate houses in the amount of Rp33,280,000,- which was taken from the APBN budget in line with the Government policy.

The target of the village development program is to establish a Pancasila Village starting from the development of the Desa Swadaya (traditional) to the Desa Swakarya (transition) and next to the Desa Swasembada (developed). The development efforts in the final year of Pelita III was to survey the Village management in 2 development Work Area Units (UDKP, Unit Daerah Kerja Pembangunan) Villages i.e. Ubud and Petang (Padung) and to organize Village Competitions.

Tabel / *Table II — 6*

DAFTAR : REKAPITULASI LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM PELITA III TAHUN 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, DAN 1983/1984
KEADAAN : AKHIR BULAN SEPTEMBER 1984.
PHYSICAL AND FINANCIAL REPORT OF THE RURAL DEVELOPMENT AID IN PELITA III (3rd FIVE YEARS DEVELOPMENT PLAN
IN 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1983/1984
SITUATION : END OF SEPTEMBER 1984

	Uraian Tahun Anggaran *Specification of the fiscal year*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984	Jumlah Pelita III *Total*	KET
1.	Jumlah Desa / *Number of Villages*	564	564	564	589	594	—	
2.	Bantuan tiap Desa/Kelurahan (Rp.) *Aid for every Village/Kelurahan (Rp)*	450.000	750.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	—	
3.	Jumlah Bantuan (Rp.) *Amount of Aid (Rp)*	316.130.000	511.739.000	720.194.000	927.000.000	948.250.000	3.423.313.000	
	a. Bantuan Langsung (Rp.) *Direct Aid*	253.800.000	423.000.000	564.000.000	736.250.000	742.500.000	2.719.550.000	
	b. Paket Proyek UDKP (Rp.) *Project packet of the Development Work Area Unit*	12.000.000	18.000.000	25.000.000	90.000.000	100.000.000	245.000.000	
	c. Bantuan Keseimbangan (Rp.) *Balancing Aid*	37.330.000	48.659.000	72.994.000	40.000.000	45.000.000	243.983.000	
	d. Bantuan khusus Hadiah Lomba Desa *Special Aid for Village Competition Prizes*	9.750.000	15.450.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	169.200.000	
	e. Bantuan Pembinaan Tk. Kecamatan (Rp.) *Aid for Sub-District Promotion*	3.250.000	6.630.000	10.200.000	12.750.000	12.750.000	45.500.000	
4.	Rencana Jumlah Proyek Prasarana Desa *Plan of total village facilities projects*	685	667	691	721	701	3.465	
	a. Prasarana Produksi *Production facilities*	11	46	39	57	79	232	
	b. Prasarana Perhubungan *Communication facilities*	249	172	209	196	181	1.007	
	c. Prasarana Pemasaran *Marketing facilities*	32	38	41	32	33	176	
	d. Prasarana Sosial *Social facilities*	393	411	402	436	408	2.050	
5.	Rencana Jumlah Biaya Investasi (Rp.) *Plan of total Budget*	654.766.433	968.857.830	1.197.532.770	1.474.636.420	1.486.426.907	5.782.200.360	
	a. Swadaya Masyarakat (Rp.) *Auto-activity of the society*	335.821.433	509.470.830	584.263.770	698.386.420	699.426.307	2.827.369.360	
	b. Bantuan Pemda (Rp.) *Aid of the Regional Administration*	6.065.000	10.678.000	16.075.000	9.250.000	—	42.068.000	
	c. Bantuan Pusat (Rp.) *Aid of the National Administration*	312.880.000	448.709.000	597.144.000	767.000.000	787.000.000	2.912.783.000	
6.	*Rencana Jumlah Kegiatan* P.K.K. *Plan of total Activities of Family Welfare Promotion*	—	564	574	599	599	2.336	
	a. Pembibitan, Pengembangan Pertanian *Seeding for Agricultural Expansion*	—	238	316	353	353	1.260	
	b. Pengembangan Kerajinan *Handicraft Expansion*	—	26	20	16	18	80	
	c. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi *Process of Elements into Manifactured Articles*	—	295	219	176	197	887	
	d. Usaha lain-lain *Other Efforts*	—	5	19	54	31	109	
7.	Rencana Jumlah Biaya Kegiatan P.K.K. (Rp.) *Plan of total PKK Activity Budget*	—	63.486.850	145.985.600	193.435.000	195.862.600	598.769.450	
	a. Swadaya Masyarakat (Rp.) *Auto-Activity of the Society*	-	7.086.850	33.185.000	46.185.000	47.362.000	133.819.450	
	b. Bantuan Pemda (Rp.) *Aid of the Regional Administration*	—	—	—	—	—	—	
	c. Bantuan Pusat (Rp.) *Aid of the National Administration*	—	56.400.000	112.800.000	147.250.000	148.500.000	464.950.000	
8.	Realisasi Penyaluran Bantuan (Rp. = %) *Realization of Aid Distribution (Rp = %)*	316.130.000	511.739.000	720.194.000	927.000.000	948.250.000	3.423.313.000	
	Prosentase (%) / *Percentage*	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Realisasi s/d tgl. 31 September 1984 *Realization until the 31rd of September 1984*							
	(1) Jumlah Proyek Prasarana Desa *Total Village facilities projects*	685	666	689	721	698	3.459	
	a. Prasarana Produksi *Production facilities*	11	46	39	57	80	233	
	b. Prasarana Perhubungan *Communication facilities*	249	172	209	197	181	1.008	
	c. Prasarana Pemasaran *Marketing facilities*	32	38	40	32	32	174	
	d. Prasarana Sosial *Social facilities*	393	410	401	435	405	2.036	
	(2) Prosentase (%) / *Percentage*	100%	99,85%	99,71%	100%	99,57%	99,82%	
	(3) Jumlah Proyek Prasarana Desa (Rp.) *Total Village facilities projects*	654.766.433	968.857.830	1.195.932.770	1.474.636.420	1.476.478.907	5.770.672.356	
	a. Swadaya Masyarakat (Rp.) *Auto-activity of the society*	335.821.433	509.470.830	584.263.770	698.386.420	696.278.907	2.824.221.360	
	b. Bantuan Pemda (Rp.) *Aid of the Regional Administration*	6.065.000	10.678.000	16.075.000	9.250.000	900.000	42.268.000	

c. Bantuan Pusat (Rp.) *Aid of the National Administration*	312.880.000	448.059.000	595.594.000	767.000.000	780.000.000	2.903.533.000
(4) Sisa Proyek Prasarana Desa *Remainder of the Village facilities projects*	—	1	2	—	3	6
(5) Sisa Biaya Bantuan Pusat. *Remainder of the National Administration Aid Budget*	—	650.000	1.600.000	—	7.000.000	9.150.000
(6) Jumlah Kegiatan PKK *Total PKK Activities*	—	564	574	599	599	2.336
a. Pembibitan dalam bidang Pertanian *Seeding for Agricultural field*	—	238	316	353	353	1.260
b. Pengembangan Kerajinan *Expansion of Handicraft*	—	26	20	16	18	80
c. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi *Process of Elements into Manufactured Articles*	—	295	219	176	197	887
d. Usaha lain-lain *Other Efforts*	—	5	19	54	31	109
(7) Prosentase / *Percentage*	100%	100%	100%	100%	100%	100%
(8) Jumlah Biaya Kegiatan PKK (Rp.) *Total PKK Activities Budget*	—	63.486.850	145.985.600	193.435.000	195.862.000	598.769.450
a. Swadaya Masyarakat (Rp.) *Auto-activity of the society*	—	7.086.850	33.185.600	46.185.000	47.363.000	133.819.450
b. Bantuan Pemda. (Rp.) *Aid of the Regional Administration*	—	—	—	—	—	—
c. Bantuan Pusat (Rp.) *Aid of the National Administration*	—	56.400.000	112.800.000	147.250.000	148.500.000	464.950.000
(9) Sisa Proyek Kegiatan P.K.K. *Remainder of the PKK Activities Projects*	—	—	—	—	—	—
(10) Sisa Biaya Bantuan Pusat. *Remainder of the National Administration Budget*	—	—	—	—	—	—

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

Tabel / *Table II — 7*

KLASIFIKASI DESA/KELURAHAN DI PROPINSI DATI I BALI
PER KABUPATEN TAHUN 1983/1984
CLASSIFICATION OF VILLAGES/KELURAHAN IN THE PROVINCE DATI I
BALI BY DISTRICT IN 1983/1984

No.	Kabupaten *District Dati II*	Jumlah Desa/kelurahan menurut tingkat perkembangannya *Number of Villages/Kelurahan in accordance with the stage of development*							
		Desa/kel Swadaya *Auto-activity Villages*		Desa/kel Swakarya *Self-activity Villages*		Desa/kel Swasembada *Self-sufficient Villages*		Total *Total*	
		mutlak *absolute*	%	mutlak *absolute*	%	mutlak *absolute*	%	multak *absolute*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	
1.	Buleleng	0	0	83	57,24	62	42,76	145	100
2.	Jembrana	0	0	7	14,29	42	85,71	49	100
3.	Tabanan	0	0	11	11	89	89	100	100
4.	Badung	0	0	28	36,84	48	63,16	76	100
5.	Gianyar	0	0	18	32,73	37	67,27	55	100
6.	Bangli	0	0	54	78,26	15	21,74	69	100
7.	Klungkung	0	0	27	48,21	29	51,79	56	100
8.	Karangasem	0	0	26	59,09	18	40,91	44	100
	Propinsi Dati I Bali *The Province Dati I Bali*	0	0	254	42,76	340	57,24	594	100

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

6. Agraria

a. Tata Guna Tanah

Masalah Tata Guna Tanah sangat penting artinya dalam rangka pembangunan, karena tanah hakekatnya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan, yang dalam penggunaannya diperlukan adanya perencanaan dan pengarahan. Mengingat pentingnya eksistensi Tata Guna Tanah, maka secara jelas diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Pasal 2, 14 dan 15) yang pada pokoknya mewajibkan kepada Pemerintah untuk menyusun suatu pola rencana Tata Guna Tanah secara menyeluruh.

6. Agrarian Matters

a. Land Use Design

In the framework of development the role of Land Use design is very important because the land in essence is the main factor of a successful development. For its utilization a perfect planning and guidelines are necessary. Considering the importance of the existence of the Land Use Design, therefore it has been administered in the Basic Law for Agriculture (Article 2, clauses 14 and 15) which basically obliges the Government to compile a complete blueprint of the Land Use Design Plan.

Penyusunan perencanaan Tata Guna Tanah ini meliputi penyusunan tanah secara berencana bagi pembangunan Daerah Tingkat II dan juga pemetaan yang meliputi pemetaan penggunaan tanah di pedesaan dan revisinya, pemetaan penggunaan tanah perkotaan dan revisinya serta pemetaan atas status tanah. Kegiatan-kegiatan yang **dilaksanakan antara lain pemetaan tanah kota** Kabupaten dan tanah **kota Kecamatan, monitoring tanah daerah, penghijauan/reboisasi, monitoring daerah miskin atau yang berpendapatan** rendah serta pemetaan **produktivitas tanah.**

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dilaksanakan juga monitoring lokasi daerah kritis, pemetaan Tata Guna Tanah daerah perkebunan serta memberikan saran penggunaan tanah dalam rangka pelaksanaan proyek pencetakan sawah dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan adanya teknisi-teknisi yang terampil dan cekatan. Hingga akhir Pelita III teknisi Tata Guna Tanah secara bergiliran dididik dalam berbagai kursus, antara lain :

- Kursus Tata Guna Tanah Menengah Atas (KTMA) bagi pegawai golongan I dan II,
- Kursus Tata Guna Tanah Lanjutan I (KTL I) bagi pegawai golongan II lama serta Sarjana Muda dan Sarjana baru;
- Kursus Tata Guna Tanah Lanjutan II (KTL II) bagi pegawai Sarjana yang sebelumnya telah mengikuti Purna Sarjana;
- Tugas Belajar di Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dan
- Graduate Study di Sekolah Pasca Sarjana.

Pelaksanaan tugas, khususnya dalam penerbitan fatwa Tata Guna Tanah di Propinsi Bali dilakukan secara teratur sejak bulan September 1981. Adapun permohonan dan penyelesaian Tata Guna Tanah yang telah diselesaikan di Propinsi Bali sejak awal sampai akhir tahun Pelita III. Lihat Tabel II-8.

This Blueprint has to include the planning of the preparation of land for the development of Dati II and also the cartography which includes the mapping of land use in rural area and its revision the mapping of land use in the cities and its revision and the mapping of the status of land. The activities which have been executed so far are the mapping of the Sub-Districts and Villages, the monitoring of land in the region, regreening of damaged forest, the monitoring of poor region or region with a low income and the mapping of land productivity.

In support of the execution of development, monitoring has also been done in location of critical regions, mapping of Land Use Design in Plantation regions has been executed and suggestions in the utilization of land have been given in preparation of the establishment of new rice fields and so on. All the works have to be done by qualified and skilled technicians. Up to the end of Pelita III the Land Use Design technicians have been trained in shifts in various courses, among others :

- *The Land Use Design Higher Grade Course (KTMA, Kursus Tata Guna Tanah Menengah Atas) for the Grade I and II government employees,*
- *The Land Use Design Extension Course (KTL I, Kursus Tata Guna Tanah Lanjutan I) for the old Grade II employees, undergraduates and new master's degree holders,*
- *The land Use Design Advance Cource (KTL II, Kursus Tata Guna Tanah Lanjutan II) for employees with master's degree who have already a doctors degree (Purna Sarjana),*
- *To be sent on study assigment to domestic as well as to foreign Universities, and*
- *Graduate Study in Post graduate schools.*

Since September 1981 the activities especially in the issuance of Land Use Design Certificates in the Province of Bali has been done continuously. All the requests and solutions of the Land Use Design which have been finished in Bali since the beginning until the final year of Pelita III can be observed in Table II-8.

Tabel / ***Table II — 8***

REKAPITULASI PENYELESAIAN PERMOHONAN FATWA (RISALAH)
TATA GUNA TANAH DALAM TAHUN ANGGARAN
1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
RECAPITULATION OF SOLUTIONS OF THE REQUESTS FOR LAND USE DESIGN CERTIFICATES IN THE FISCAL YEARS 1980/1981. 1981/1982. 1982/1983 and 1983/1984

No.	Tahun	Pm.H.M.			Pm.H.P.			Pm.H.G.B.			Pm.H.G.U.			Pm.H.P.I.			Pm.Konversi			Keterangan
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1.	1980/1981	–	–	–	1	1	–	–	–	–	6	6		–	–	–	–	–	–	
2.	1981/1982	255	255	6	246	246	8	6	6	5	2	2	–	2	2	–	–	–	–	
3.	1982/1983	462	452	–	52	53	–	19	19	–	–	–	–	–	–	–	103	103	–	
4.	1983/1984	304	32	272	202	12	390	48	17	31	–	–	–	–	–	–	537	300	237	

Keterangan / ***Remarks :***
A : Berkas permohonan masuk
Input of request letters
B : Penyelesaian / ***Solutions***
C : S i s a / ***Rest***

Sumber : BAPPEDA Tk. I BALI.
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

Pm : Permohonan / ***Request***
HM : Hak Milik / ***Proprietary Right***
HP : Hak Pakai / ***Usufruct Right***
H.G.B. : Hak Guna Bangunan / ***Building Right***
H.G.U. : Hak Guna Usaha / ***Long-lease Right***
H.P.L. : Hak Pengelolaan / ***Exploitation Right***
Konv : Konversi Penggunaan Tanah
Conversion of Land Use

b. Landreform

Untuk menangani masalah landreform di Propinsi Bali telah dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform. Program kerjanya adalah meliputi :

a) kegiatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil,
b) penyelesaian masalah/sengketa landreform,
c) penyuluhan bagi Camat dan Kepala Desa,
d) mengusulkan besarnya uang ganti rugi bagi pemilik tanah kelebihan dan abente.

Perjanjian bagi hasil untuk tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh Bali dilaksanakan dengan terbentuknya team teknis perjanjian bagi hasil di 4 (empat) Kabupaten dari delapan Kabupaten di Bali.

Penyelesaian masalah/sengketa Landreform selesai pada akhir Maret 1983 dan sisa objek Landreform yang dikerjakan dan diredistribusikan sampai akhir Maret 1984 adalah untuk tanah sawah seluas 1.594 Ha dan tanah kering seluas 712.586 Ha.
Selama Pelita III sengketa yang masuk sebanyak 60 buah kasus, telah diselesaikan sebanyak 13 buah kasus dan sisanya masih dalam proses. Sengketa Landreform selama Pelita III ini berkisar pada masalah keberatan atas penetapan luas minimum wajib lapor, jual beli tanah sebelum peraturan Landreform. Penyelesaian masalah Landreform selama Pelita III di Propinsi Dati I Bali. Lihat Tabel II-9.

b. Landreform

In Bali a Committee of Landreform Judgement has been formed to solve landreform problems. The programme of this Committee includes :

a) activities in the execution of production sharing,
b) solution of landreform problems/conflicts
c) guidelines for Heads of the sub-Districts and Heads of Villages
d) suggestion of the amount of recompense for the owner of surplus land.

In four out of the eight districts in Bali a technical team for product sharring aggreements in the villages and sub-districts has been formed.

The solutions of landreform problems/disputes had been finished at the end of March 1983 and the rest of this object consists of 1,594 Ha land for rice fields and 712,586 Ha dry land. In the period of Pelita III there had been 60 dispute matters from which 13 were solved and the rest of it was still under process.

The disputes are concerning objection problems about the obligation to report the minimum fixed surface of land which has been traded before the Landreform regulations. The solutions of landreform problems in the period of Pelita III in Bali can be observed in Table II-9.

The stagnation in finishing the solutions of all those problems was a result of the limited budget for these cases and the limited authority of the persons in the Administration involved.

Tabel / ***Table II — 9***

PENYELESAIAN MASALAH LANDREFORM SELAMA PELITA III
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SOLUTIONS OF LANDREFORM DISPUTES DURING PELITA III
IN THE PROVINCE OF BALI

No.	Kabupaten / *District*	Sengketa yang masuk / ***Number of disputes***						Yang telah diselesaikan / ***Solved***					
		Tahun / ***Year***						Tahun / ***Year***					
		1979	1980	1981	1982	1983	Jumlah ***Total***	1979	1980	1981	1982	1983	Jumlah ***Total***
1.	Jembrana	1	7	—	2	—	10	—	2	—	1	—	3
2.	Badung	—	1	4	—	—	5	—	—	2	—	—	2
3.	Tabanan	1	2	—	—	—	3	1	1	—	—	—	2
4.	Buleleng	3	12	6	—	—	21	—	1	—	—	—	1
5.	Klungkung	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
6.	Gianyar	4	5	2	—	—	11	1	2	—	—	—	3
7.	Karangasem	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
8.	Bangli	4	2	1	—	—	7	2	—	—	—	—	2
	Jumlah Total	16	29	13	2	—	60	4	6	2	1	—	13

Catatan

1. Dalam Pelita III tercatat sebanyak 60 masalah, telah diselesaikan 13 masalah

2. Sampai dengan Pelita III jumlah masalah yang terdaftar di Bali sebanyak 804 masalah
Yang sudah diselesaikan oleh 804 masalah tersebut sebanyak 243 masalah.

Sumber : BAPPEDA TK. I BALI / ***Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.***

Remarks :

1. 60 problems have been registered, from which 13 were solved.

2. Until Pelita III the number of registered problems in Bali were 804 items, from which 243 were solved.

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian sengketa ini adalah terbatasnya dana dalam penanganan penyelesaian masalah tanah serta adanya keterbatasan kewenangan dalam hal penanganan masalah. Dengan berlakunya Keppres Nomor 55 tahun 1980, maka penyelesaian masalah Landreform dilaksanakan secara fungsional oleh Bupati Kdh Tingkat II sesuai dengan kewenangannya untuk mengadakan pendekatan dengan pihak pengadilan. Dalam penanganan masalah Landreform ini pihak Agraria diminta pertimbangan atau sebagai saksi ahli.

Penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan Agraria umumnya dan Peraturan-peraturan Landreform khususnya, dilaksanakan secara serentak di seluruh Desa dan Kecamatan di Bali oleh Anggota Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten bersama-sama petugas Kantor Agraria Kabupaten.

c. *Pengurusan Hak-hak atas Tanah*

Program kerja di bidang ini pada dasarnya bertujuan untuk meletakkan dasar bagi terciptanya suatu tata kehidupan dalam masyarakat, dimana pengusahaan tanah dapat memberikan nilai ekonomis secara maksimal yang tertuju kepada usaha-usaha untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan jaminan hukum bagi yang memiliki.
Dengan demikian kegiatan yang berupa pemberian sesuai hak atas tanah dalam rangka pembangunan akan lebih memantapkan usaha-usaha yang sedang dan akan dilaksanakan, karena kegiatan ini merupakan salah satu faktor yang menunjang peningkatan pembangunan.

Selama Pelita III beberapa Instansi Pemerintah/Dinas telah mengirimkan daftar dan mengajukan permohonan hak atas tanah, antara lain untuk Instansi Tingkat Propinsi sebanyak 401 bidang tanah dan untuk Instansi Tingkat Kabupaten sebanyak 482 bidang tanah. Adapun perincian pengajuan permohonan hak dan Surat Keputusan yang diterbitkan selama Pelita III adalah sebagai berikut :
- Tahun anggaran 1979/1980 sebanyak 129 Skp Hp dengan luas 351.775 M2
- Tahun anggaran 1980/1981 sebanyak 115 Skp Hp dengan luas 323.696,40 M2
- Tahun anggaran 1981/1982 sebanyak 24 Skp Hp dengan luas 571.952,10 M2
- Tahun anggaran 1982/1983 sebanyak 150 Skp Hp dengan luas 452.385 M2
- Tahun anggaran 1983/1984 sebanyak 112 Skp Hp dengan luas 340.898 M2

Jumlah sebanyak 750 Skp Hp dengan luas 2.040.706,50 M2

Dari semua Surat Keputusan pemberian hak sudah didaftar dan dilunasi biaya administrasinya yang disediakan dalam dana APBN. Sedangkan pelepasan hak tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah termasuk Perushaaan-perusahaan Milik Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga ada juga.

With the validity of the presidential decree, the Keppres No 55 tahun 1980, the solution of landreform problems has to be executed by Bupati Kdh Tingkat II (the Bupati, the Head of the District) in line with his authority to make contact with the the Judiciary. In case of any dispute the Bureau for agricultural matters can be requested as consultant or an expert-witness.

Guidance for the increase of knowledge of the society concerning the Law and Agrarian regulations in general and especially the Landreform regulations has been executed at the same time in all the villages and sub-districts in Bali by members of the Committee of Landreform Judgement in the Districts together with the officials of the Bureau of Agricultural matters.

c. *Management of Land Titles*

The work programme of the Land Titles management principally has, the aim to form the basic living environment in the society, in which the exploitation of land may result in a maximum economic value to be used for the efforts to achieve social welfare and to guarantee Law for those who have the right to receive it. So the activities in the certificating of Land titles in the framework of the development certainly support the efforts which are going on and still have to be done, because this efforts are one of the many factors, which support the development.

In the period of Pelita III several government institution/administration have submitted a list containing requirements for Land Titles, among others for the provincial institutions 401 parcel of lands and for the district institutions 482 parcels.

The specification of Land Titles and the issued Land Certificates in the period of Pelita III are as follows :
- *In the fiscal year 1980/1981 an amount of 115 Skp HP with a surface of Usufruct Rights) with a land surface of 351,775 M², *
- *In the fiscal year 1980/1981 an amount of 115 Skp with a surface of 323,696,40 M²,*
- *In the fiscal year 1981/1982 an amount of 244 Skp Hp with a surface of 571,952,10 M²,*
- *In the fiscal year 1982/1983 an amount of 150 Skp Hp with a surface of 452,385 M²*
- *In the fiscal year 1983/1984 an amount of 112 Skp Hp with a surface of 340,898 M²*

The total amount is 750 Certificates of Usufruct Rights with a landsurface of 2,040,706,50 M²

All those certificates have been registered and the administration tax has been payed off with the prepared APBN Fund. There were also certificates which relinguished government-owned land rights including those of the government-owned public corporations to third persons.

There are some stagnations in the execution of land relinguishment for the development, among others :

a. Not all decisions of the Committee of land Relinguishment concerning the amount of recompense have been accepted by the land owners,

b. The pinpoint of the relinguished location is not yet definite,

c. The allocated budget is not enough to pay the compensation of land in line with the decision of the Committee

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan terdapat beberapa hambatan, antara lain :

a) tidak semua keputusan Panitia Pembebasan Tanah mengenal besarnya ganti rugi diterima oleh pemilik tanah,
b) penunjukkan alokasi yang dibebaskan belum matang,
c) dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi tanah sesuai dengan hasil keputusan panitia.

Adapun usaha Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan tanah untuk pemekaran kota/perumahan dan industri, berpedoman pada planologi Daerah Tingkat I dan Tingkat II di Propinsi Bali, yang dilaksanakan dengan : (a) menghindarkan pengurangan areal tanah pertanian yang subur, (b) memanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif, (c) menghindarkan pemindahan penduduk dari tempat kediamannya, serta (d) memperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran atau pencemaran terhadap lingkungan yang bersangkutan.

Dalam hal pemecahan masalah pertanahan di Propinsi Dati I Bali selama Pelita III, sebagai akibat dari pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkat sedangkan tanah yang tersedia terbatas. Lihat Tabel II-10.

d. Pendaftaran Tanah

Permasalahan pendafataran tanah yang dihadapi oleh Pemerintahan saat ini adalah bagaimana perwujudannya agar dalam waktu relatif singkat dan biaya yang tidak begitu besar, tanah-tanah milik rakyat mempunyai sertifikat, dalam arti telah terdaftar.
Dengan telah terdaftarnya tanah tersebut (telah memiliki sertifikat), pemiliknya merasa aman dan tenteram dalam pengusahaan dan penggunaan tanahnya, karena haknya dilindungi menurut Undang-undang. Disamping itu juga masalah-masalah tanah, sengketa-sengketa pertanahan dapat berkurang.

Dalam bidang pendaftaran tanah ini Pemerintah Daerah Tingkat I Bali melakukan pembinaan terhadap Camat selaku pembuat Akte Tanah melalui penataran-penataran di tingkat Propinsi maupun Kabupaten, mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi, memberikan teguran-teguran secara langsung mengenai pelaporan - penyimpanan warkat ataupun masalah lainnya.

Hasil pensertifikatan tanah di Propinsi Dati I Bali sejak tahun 1979 sampai dengan bulan Agustus 1983 adalah sebanyak 72.153 buah. Lihat Tabel II-11.

e. PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)

Pembentukan PRONA adalah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan GBHN dan Catur Tertib di bidang pertanahan sebagaimana digariskan dalam Pelita III dan PRONA ini mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1981.
Masalah pokok yang menjadi tugas PRONA adalah :

- melaksanakan suatu program pensertifikatan tanah secara massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagaimana tanda bukti yang kuat, terutama dalam rangka meningkatkan maupun menunjang pelaksanaan Landreform,
- melaksanakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kasus-kasus tanah yang berupa sengketa yang bersifat strategis dan menyelesaikan secara tuntas.

Kedua masalah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerawanan/kepekaan di bidang pertanahan, memantapkan pelaksanaan Landreform serta menunjang usaha-usaha pengendalian dan pengawasan penguasaan/pemilikan tanah.

Sejak berlakunya PRONA hingga tahun terakhir Pelita III telah dihasilkan pensertifikatan tanah melalui Proyek Sertifikasi Massa dan PRONA sebanyak 41.046 buah, walaupun ditargetkan 53.470 buah. (lihat Tabel II-12).

Untuk melaksanakan PRONA dalam Repelita IV diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

- menetapkan lokasi PRONA dan perkiraan target jumlah sertifikat yang akan diterbitkan pada tiap Kabupaten di Propinsi Dati I Bali. Direncanakan untuk menerbitkan 2.000 sertifikat melalui APBD dan 2.000 Sertifikat melalui APBN pada masing-masing Kabupaten setiap tahun.
- penyuluhan yang bersifat intern. Penyuluhan intern bagi kalangan instansi Agraria di daerah-daerah dan ekstern adalah untuk memberikan kesadaran akan kewajiban masyarakat terhadap tanah.

7. PKK

Penduduk Bali yang sebanyak 2.555.300 jiwa, terdiri dari 1.266.300 laki-laki dan 1.289.000 orang perempuan.
Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk, maka terlihat bahwa

The efforts of the regional administration in preparing land for the expansion of the city/settlements and industry follows the planology of the Dati I and II in the Province of Bali which have been executed by means of : (a) avoiding the subtraction of fertile agriculture land zones, (b) utilizing unproductive land (c) avoiding the transfer of inhabitans out of their residence to other regions and (d) taking into account the requirements to avoid pollution in the circumference involved.

The solution of land problems in the Province of Bali during Pelita III as a result of the yearly increase of population, whereas the available land quite limited, can be observed in Table II-10.

Tabel / *Table II — 10*

PEMECAHAN MASALAH PERTANAHAN DI PROPINSI DATI I BALI
SOLUTION OF LAND PROBLEMS IN THE PROVINCE OF DATI I BALI

Tahun Anggaran *Fiscal year*	Permohonan yg diproses *Processed requrest*	Diselesaikan *Solved*	Sisa *Rest*	Keterangan *Remarks*
				Kesulitan karena kurangnya
1979/1980	803	71	732	tenaga dan banyak warkah
1980/1981	1288	427	86	yang belum lengkap
1981/1982	1702	571	1130	*Difficulties as a result of*
1982/1983	1368	157	1211	*limited manpower and many*
1983/1984	1433	114	1319	*still uncompleted documents*

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali.
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

d. Land registration

The problems of land registration nowadays face by the government is that in the shortest possible time and with a reasonable budget the land owned by the population can be certificated or registered. With a registered land (the owner has the certificate) the owner feels safe in the exploitation and the utilization of his land, because his rights are protected by Law. Besides, land problems and land disputes can be decreased.

In the land registration sector the regional administration of Dati I Bali gives guidance to the Head of the Sub-district because of his function to make the Land Act documents by means of upgrading courses in the province as well as in the districts, direct inspections in the location, admonishing concerning reports and document-deviations or concerning other problems.

The Land certificates which have been issued in the Province of Dati I Bali since 1979 until August 1983 are 72,153 pieces. A complete specification can be observed in Table II-11.

Tabel / *Table II — 11*

HASIL PENSERTIFIKATAN TANAH DI PROPINSI DATI I BALI
LAND CERTIFICATES ISSUED IN THE PROVINCE OF DATI I BALI

No.	Tahun Anggaran *Fiscal year*	Jumlah Sertifikat *Number of Certificates*	Keterangan *Remarks*
1.	1979/1980	10.904	
2.	1980/1981	18.308	
3.	1981/1982	20.662	
4.	1982/1983	15.221	s/d bulan Agustus 1983
5.	1983/1984	7.058	*until August 1983*
	Jumlah - Total	72.153 buah	

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali
Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

e. PRONA (Agrarian Special Service)

The establishment of PRONA is one of the efforts to execute the GBHN (Guidelines on State Policy) and the Catur Tertib (Four-point Legal Order) in land matters as stipulated in Pelita III. Its validity is from the 15th August 1981.

The main problems to be solved by PRONA is :

- *to execute a mass program in certificating land in order to guarantee legal security in the land exploitation and ownership as a strong evidence, mainly in the framework of increasing as well as in supporting the execution of Landreform.*
- *to control and search the event of land dispute which has a strategic character and to try to solve the problem completely.*

Both solutions have the aim to diminish trouble spots in land management, to safeguard the execution of Landreform and to support the efforts to manage and to control authority/ownership of land.

Since the validity of PRONA until the final year of Pelita III the Land Certificate Project and the PRONA succeeded to publish 41,046 certificates out of the planned 53,470 certificates. (See Table II-12).

Tabel / *Table II — 12*

HASIL PENSERTIFIKATAN TANAH MELALUI PROYEK SERTIFIKAT MASAL DAN PRONA PADA PELITA III

LAND CERTIFICATES ISSUED THROUGH THE MASS CERTIFICATE PROJECT AND PRONA IN PLITA III

No.	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Jumlah Sertifikat *Number of Certificates*		Keterangan *Remarks*
		Target *Target*	Realisasi *Realization*	
1.	1979/1980	–	–	
2.	1980/1981	10.322	10.322	
3.	1981/1982	7.500	7.500	
4.	1982/1983	19.648	19.648	
5.	1983/1984	16.400	3.576	Penyerahan Tahap I
	Jumlah *Total*	53.470	41.046	Ith Commissioning

Sumber : BAPPEDA Tingkat I Bali

Source : Regional Development Planning Board of Bali Province.

jumlah kaum wanita lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian tanpa keikut sertaan kaum wanita dalam pembangunan dapat mengakibatkan keterlambatan proses pembangunan. Dan jumlah terbanyak wanita Indonesia yang belum terangkat arus utama pembangunan adalah kaum wanita pedesaan dan perkotaan rawan yang berpenduduk dan berpenghasilan rendah.

Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda pada khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk lebih memberikanl peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan serta kemampuan kaum wanita di berbagai bidang sesuai dengan keperluannya, baik melalui gerakan PKK maupun melalui program-program organisasi wanita lainnya.

Panca Dharma Wanita menyebutkan bahwa peranan kaum wanita ada 5 (lima) yaitu sebagai istri, ibu rumah tangga, pendidik anak, penyambung keturunan dan sebagai anggota masyarakat.

Dengan adanya beberapa peranan kaum wanita tersebut, maka sejarah membuktikan bahwa di Propinsi Dati I Bali kaum wanita secara aktif mengambil bagian dalam setiap kegiatan pembangunan, baik dalam kemasyarakatan maupun dalam pembinaan anak/generasi muda. Hal ini disebabkan karena masyarakat Bali memiliki keyakinan dan pandangan hidup yang memberikan dukungan positif dalam usaha penerapan program-program pembangunan antara lain :

a. adanya keyakinan keharusan taat kepada catur guru, yaitu : Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah, Guru/Pendidik dan orang tua,
b. adanya keyakinan bahwa manusia hidup adalah harus bekerja, karena kerja itu adalah suatu pengorbanan (Yadnya) yang selalu diwajibkan untuk dilakukan,
c. adanya keyakinan akan hukum karma pala (salah satu dari Panca Crada) yaitu dorongan untuk berbuat baik, karena setiap perbuatan akan diikuti dengan hasil/akibat sesuai dengan baik dan buruk perbuatan tersebut.

Adanya keyakinan-keyakinan tersebut merupakan pendorong dalam motivasi masyarakat agar lebih terangsang mengikuti program-program pemerintah.

Dalam kaitannya dengan peranan wanita, pelaksanaan sepuluh program PKK di Propinsi Dati I Bali dilaksanakan secara integral dengan program-program instansi lainnya. Dan program PKK di Bali dilaksanakan secara menyeluruh di 594 Desa/Kelurahan.

Adapun kegiatan PKK yang dengan sendirinya adalah kaum wanita selama ini adalah aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pengembangan/pembangunan masyarakat, sesuai dengan yang tercantum dalam program-programnya antara lain kegiatan jahit menjahit, memasak dan sebagainya. Yang paling menonjol adalah dalam kegiatan industri kerajinan rumah tangga (misalnya membuat tenunan dan kerajinan tangan lainnya).

Sebagaimana halnya dengan di daerah-daerah lainnya, maka pada umumnya kegiatan PKK di Propinsi Dati I Bali ini menyangkut masalah pembinaan keluarga dan bersifat peningkatan pemerataan pendapatan, antara lain dengan memanfaatkan pekarangan, pagar hidup, juga merangsang masyarakat untuk dapat menabung (misalnya dengan didirikannya Koperasi Simpan Pinjam, dan sebagainya). Agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK dapat berjalan dengan baik dan dapat lebih meningkat lagi, maka dilaksanakan pembinaan organisasi secara beranting untuk PKK Tingkat Propinsi sampai Tingkat Desa dan juga bagi organisasi lainnya di tingkat Propinsi sampai tingkat

The policy of the PRONA execution in Repelita IV will be as follows :

- *Decision of PRONA location and estimation of certificate target which will be issued in every District in the Province of Dati I Bali. It has been planned to issue 2000 certificates through APBD and 2000 certificates through APBN per year in every District.*
- *Guidelines for the government employees involved. The internal guidance and counseling for members of the agrarian institutions in the regions and external information with the aim to cultivate awareness among the society on responsibilities to their land.*

7. Family Welfare Promotion (PKK)

The 2,555,300 inhabitans of the island of Bali consist of 1,266,300 men and 1,289,000 women. This means that there are more women than men. Thus without participation of the women the development process could be stagnated. Most women in Indonesia who have not yet participate in the national development are those who are living in the rural regions and in the slums of the cities with a very low income.

The role of women in the development will not affect its role in the welfare promotion of the family, especially in guiding the younger generation to the promotion of the "Manusia Indonesia Seutuhnya" (Refined Man of Indonesia). The government has made efforts to increase the education, skill and capabilities of women in all fields to give them a more important role and responsibility in the development of the country in line with the needs through the PKK as well as through other women organization programmes.

In the Panca Dharma Wanita is stated that the role of women consists of 5 (five) principles : as wife, as hostess, as mother, to beget children and as member of the society.

The Balinese women take active part in every kind of development in the region, in the society as well as in the promotion of the younger generation/children.

Their activities are based on their conviction and phylosophy of life which encourage them to join in the development programme efforts in a positive way, such as :

a. the conviction to have to obey the "catur guru" (four masters) : God, the Government, the Teachers/Pedagogues and the Parents,
b. the conviction that the human being has to work, because work means a sacrifice (Yadnya) which has to be done continuously,
c. the conviction in the "Karma Pala" Law (one of the Panca Crada) which stimulates to have a good behaviour, because any deed will be followed by an achievement or a result whether it is good or bad.

Those convictions are stimulations to motivate the society to be more active in the execution of the government programmes.

In relationship with the women's role, the execution of the ten PKK programmes in the Province of Bali has to be integrated with the programmes of other institutions. The PKK programmes has been executed in all 594 Villages/Kelurahan in Bali.

It stands to reason that all the PKK activities will be done by women who up till now take an active part in the expansion and development activities of the society in line with what has been aimed in the programmes such as sewing activities, cooking and so on. The family's handicraft industry activities are the most obvious (textile and other handicrafts).

The PKK activities in Bali like in other regions generally are in the field of family welfare promotion and is characterized in efforts to increase income equally, among other things to make benefit of the house garden, and to make advantage of the hedge consisting of growing plants and to stimulate the society to save money (in Banking Cooperatives).

In order to guarantee the smooth running of the PKK activities, therefore a relay renovation of the organization has been executed for the PKK in the Province till the Villages and for the other organizations from the Province till the Sub-districts. So the PKK programme will be adopted in the society. In order to execute the 10 PKK programmes continuously, efforts must be made to intensify the unity of the society.

To increase the prestige of women, it is hoped that a more important role will be given to the women, so that they can participate in the development programmes but on the other hand they have to advance their education and knowledge in order to by synchronized with the requirements of the development expansion.

8. Other Development Aids

The development of the Bali region beginning from the first Pelita up till now and also that of the other region has been financed by the APBN/sectoral, the provincial APBD, the District APBD and the Inpres Funds. Besides there are also development programmes financed by foreign aid.

Since 1979 Bali region has been used as the research centre of fishery resources in the Indonesian Ocean by the Indian Ocean programme (IOP) Project, which is a joint venture between the Government of Indonesia, West

kecamatan. Dengan demikian program PKK benar-benar dapat memasyarakat. Dan juga agar 10 program PKK dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, maka kesatuan masyarakat ditingkatkan lagi.

Untuk meningkatkan derajat kaum wanita, maka diharapkan agar lebih memberikan peranan kepada wanita untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan; tetapi juga kaum wanitanya harus meningkatkan taraf pendidikan dan pengetahuanannya agar selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan.

8. Pembangunan Berbantuan lainnya

Pembangunan Daerah Bali yang dilaksanakan Pelita demi Pelita, sebagaimana juga dengan pembangunan daerah-daerah lainnya dibiayai APBN/Sektoral, APBD Tingkat I, APBD Tingkat II dan dari dana Inpres. Selain biaya dari dana-dana tersebut ada pula pembangunan yang mendapatkan bantuan dari luar negeri.

Sejak tahun 1979 daerah Bali digunakan sebagai tempat atau pusat penelitian sumber hayati perikanan Samudra Indonesia melalui proyek Indian Ocean Programme (IOP), yang merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman Barat dan Australia. Proyek IOP ini direncanakan akan dilaksanakan dalam beberapa tahun sebagai tindak lanjut dari lembaga penelitian yang telah direkomendasikan. Dan sebelum diperkenalkan pada masyarakat akan dilaksanakan uji coba terlebih dahulu.
Karena proyek ini merupakan kerja sama dengan Pemerintah asing, maka dengan sendirinya mendapat bantuan dana dari luar negeri (negara tersebut), namun besarnya dana ini belum dapat diperkirakan.

Kemudian dalam 2 Pelita (Pelita II & III) di daerah Bali telah terpasang sarana penyediaan Air Bersih (PAB) yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah juga mendapat bantuan dari UNICEF, yang perinciannya sebagai berikut :
PP sebanyak 145 buah; Sumur Artesis sebanyak 7 buah; PAH 607 buah; PMA sebanyak 102 buah; SPT Dangkal sebanyak 7.722 buah; SPT Dalam sebanyak 1.310 buah; Sumur gali 300 buah dan Jamban Keluarga sebanyak 94.100 buah.

Germany and Australia. This IOP project has been planned to be executed in several years as a follow-up of the research plan which has been recommended in advance. And before it is presented to the society it has to undergo a test. Since this project is a joint project with a foreign government automatically it receives foreign aid (in this case from West Germany and Australia) but the amount is still not yet clear.

In Pelita II and III the facility to supply clean water (PAB, Penyediaan Air Bersih) has been installed. The installation of the PAB in Bali was financed by the Regional Administration and the UNICEF aid. The specification of the work is as follows : PP 145 pieces, Artesian well 7 pieces, PAH 607 pieces, PMA 102 pieces, shallow manual pump well 7,722 pieces, deep manual pump well 1,310 pieces, digged wells 300 pieces and family lavatories 94,100 pieces.

B A B / *CHAPTER III*

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
ECONOMIC DEVELOPMENT

Secara kuantitatif, kaitan antara Produk Domestik Regional Bruto **(PDRB) Propinsi Bali dengan** Unsur-unsur Trilogi Pembangunan Nasional, **ialah sebagai** berikut :

a. **Pemerataan pembangunan,** khususnya "jalur pemerataan pembagian pendapatan" dapat diukur dengan pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan yang relatif merata di seluruh Kabupaten Bali, yang sekaligus juga sebagai pengukur "jalur pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah".
b. **Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,** diukur dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
c. **Stabilitas Regional,** yang sehat dan dinamis khususnya di bidang perekonomian dapat diukur dengan laju implikasi inflasi atau perkembangan indeks implisit harga PDRB. Hasil perhitungan atau estimasi PDRB Bali ini dapat memberikan gambaran sampai sejauh mana Trilogi Pembangunan di Propinsi Bali tercapai. Sedangkan kenaikan produksi volume barang dan jasa dari tahun ke tahun dapat ditinjau dari data laju pertumbuhan Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan.

Dengan demikian penyajian hasil estimasi PDRB Bali ini mempunyai kaitan atau relevansi dengan analisa kebijaksanaan ekonomi dan penyusunan perumusan serta pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi atau pembangunan di Bali. Dalam arti bahwa data PDRB itu dapat dipakai antara lain untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut secara sektoral, sehingga dapat dimonitor sektor-sektor mana saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Bali sejak Pelita I hingga Pelita III menunjukkan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sejak tahun 1975 hingga tahun 1984.

Laju pertumbuhan yang terjadi selama Pelita I sebesar 8,3% dan dalam Pelita II sebesar 10,24%, sedangkan dalam Pelita III sebesar 9,51% rata-rata per tahun.

Secara keseluruhan PDRB Bali atas dasar harga berlaku, berkembang dari Rp 152,9 milyar pada tahun 1975 meningkat menjadi Rp 354,16 milyar pada tahun 1979, Rp 486,00 milyar pada tahun 1980, Rp 599,18 milyar pada tahun 1981, Rp 739,89 milyar pada tahun 1982, Rp 904,95 milyar pada tahun-1983 dan pada tahun 1984 meningkat lagi menjadi Rp 1.096,07 milyar.

Apabila diperhatikan perkembangan yang terjadi secara relatif menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi antara 22% sampai dengan 37% setiap tahunnya dan secara rata-rata dalam periode 1979-1983 meningkat sebesar 26,58%. Jika diperhatikan lebih lanjut, maka peningkatan PDRB Propinsi Bali dari tahun ke tahun adalah sebagai akibat tejadinya peningkatan di semua sektor pembangunan, baik di sektor pertanian maupun pada sektor-sektor yang termasuk non-pertanian. Dalam sektor pertanian itu sendiri terjadi peningkatan nilai tambah dari Rp 150,09 milyar pada tahun 1979 menjadi Rp 390,29 milyar pada tahun 1983. Sedangkan sektor-sektor di luar sektor pertanian juga mengalami peningkatan dari Rp 204,07 milyar pada tahun 1979 menjadi Rp 514,68 milyar pada tahun 1983. Lihat Tabel III-1.

PDRB Propinsi Bali atas dasar harga konstan 1975, mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 152,9 milyar menjadi Rp 425,73 milyar (1975-1984). Inipun menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 12,60% per tahun.

Prosentase daripada distribusi PDRB Propinsi Bali atas dasar harga konstan 1975 tampak bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang memiliki peranan paling besar. Tahun 1984 besarnya peranan sektor pertanian 42,18%. Sumbangan terbesar kedua berasal dari sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor pengangkutan dan Komunikasi menempati urutan ketiga, baru menyusul sektor Jasa-jasa yang memberikan sumbangan atau konstribusi sebesar 9,16% (tahun 1984).

Dalam masa Pelita III sektor industri memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Bali sekitar 4% - 5% dan ternyata mengalami rata-rata laju pertumbuhan sebesar 17,17% per tahun. Sedangkan sektor yang paling kecil sumbangannya adalah sektor penggalian, yaitu dibawah 1% dan rata-rata laju pertumbuhannya per tahun sekitar 17,44%. Lihat Tabel III-2.

THE QUANTITATIVE relationship between the Gross Regional Domestic Product (PDRB; Produk Domestik Regional Bruto) in the Province of Bali with the Elements of the Trilogy Development is as follows :

a. Equitable distribution of development especially the "Files of equity in the distribution of "income" can be measured with the income per capita and the distribution of income which is relatively equitable in all the districts of Bali and at the same time is also a measurement for the "Files of equity in the spreading of development in the whole region".
b. A rather high economic increase measured with the increasing rate of the Gross Regional Domestic Product (PDRB) based on constant prices.
c. A sound and dynamic regional stability especially in the economy can be measured with the implication of rate of inflation or the implicit index development of the PDRB rate. The result of calculation or estimation of the PDRB in Bali can give a figure of Trilogy development achievements in the Province of Bali. Whereas the increase of article volume products and services for years can be observed from the data of the increase in the Gross additional value based on constant prices.

So the presentation of the PDRB estimation result is related or relevant with the economic policy analysis and the formulation including the execution of the economic policy or development in Bali. This means that the PDRB data among other things can be utilized to measure the economic increase in those regions with a sectoral system, so that the sector which causes economic increase or decrease in a certain region can be monitored.

Since Pelita I until Pelita III the PDRB value in the Province of Bali had the tendency to increase by the years especially since 1975 until 1984.

The increase economic occured during Pelita I was 8,3% and in Pelita II 10,24%, whereas the average in Pelita III was 9,21% per year.

In all the PDRB of Bali based on the current prices it had increased from Rp152,9 billion in 1975 to Rp354,16 billion in 1979, to Rp486,00 billion in 1980, to Rp599,18 billion in 1981, to Rp739,89 billion in 1982, to Rp904,95 billion in 1983 and to Rp1,096,07 billion in 1984.

If the occuring development be observed it showed a relative increase with a variation between 22% and 17% per year and in the period of 1979-1983 an average increase of 26,58%. A further observation shows that the yearly PDRB increase in Bali was a result of the increase of activity in all sectors of the development like the agricultural sector as well as the non-agricultural sectors. The agricultural sector had an increase from Rp150,09 billion in 1979 to Rp390,29 billion in 1983. Whereas the increase of the non-agricultural sector was from Rp204,07 billion in 1979 to Rp514,68 billion in 1983 (See Table III-1).

Based on the constant prices in 1975 the PDRB of the Province of Bali increased from Rp152,9 billion to Rp425,73 billion (1975-1984). It was an average growth of about 12,60% per year.

Taking into consideration the distribution of PDRB based on the constant prices in 1975 it showed that the agricultural sector still had the most important role. In 1984 it was 42,18%. On the second place came the Hotel, Restaurant, Trade and Commerce sector. The transportation and Communication sector took the third place. The public services took the last one with a contribution of 9,16% (in 1984).

In the period of Pelita III the industrial sector supported the establishment of PDRB Bali with about 4% - 5%. This increased with 17,71% per year. The smallest came from the Quarrying sector i.e. less than 1% and its average growth per year was about 17,44% (See Table III-2).

Based on the above mentioned explanation we could see shifting in the economic activities during the period of Pelita III in Bali, i.e. from the primary sector (agriculture, mining and quarrying) to the secondary sector (manufacturing industry, electricity, gas and water supply and construction) and to the tertiary sector (trade and commerce, hotel and restaurant, transportation and communication, bank and other financial intermediaries, ownership of dwelling, administration and defence and services).

This shifting was a result of the decrease of contribution in the primary sector to the forming of the PDRB during that period from [illegible] to 37,26%, whereas the role of the secondary and tertiary sectors increased from 57,[illegible]9% to 62,74% and from 44,50% to 50,68% (1979-1984).

Nevertheless the role of the agricultural sector in the economy of Bali remained big. This could be observed from the sectoral role against the PDRB based on the current prices as follows :

a) Agricultural sector : 43,13%
b) Trade and commerce, Hotel and Restaurant sectors : 14,02%.
c) Transportation and Communication sector : 9,67%
d) Services sector : 9,09%

Tabel / *Table III — 1*

NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU
VALUE OF THE GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT IN BALI BASED ON CURRENT PRICES

(Dalam Jutaan Rupiah / *In Million Rupiahs*)

Lapangan Usaha / *Sphere of action*	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. P e r t a n i a n / *Agriculture*	**150.086,90**	**218.306,71**	**258.128,89**	**313.714,45**	**390.268,44**
1.1. Tanaman Bahan Makanan *Foodstuff*	105.051,54	153.584,51	172.858,48	207.803,82	256.169,46
1.2. Tanaman Perkebunan *Plantation*	11.986,30	14.965,67	24.503,51	22.302,76	32.139,94
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya *Animal Husbandry and products*	27.559,36	42.407,14	47.626,59	66.660,32	72.546,56
1.4. K e h u t a n a n / *Forestry*	80,84	98,70	130,11	206,92	80,05
1.5. P e r i k a n a n / *Fishery*	5.048,86	7.250,69	13.010,20	16.740,63	29.332,43
02. Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	**2.573,12**	**3.223,54**	**4.674,35**	**5.396,07**	**5.907,16**
03. I n d u s t r i / *Industry*	**16.350,88**	**22.322,05**	**28.941,48**	**34.098,16**	**38.993,01**
3.1. Industri Besar dan Sedang *Heavy and Medium Industry*	6.098,87	7.192,24	9.760,98	10.343,32	11.551,62
3.2. Industri Kecil *Light Industry*	4.564,23	7.803,55	8.801,38	12.141,43	14.838,57
3.3. Kerajinan Rumah Tangga *Home Industry*	4.877,78	7.326,26	10.379,12	11.613,41	12.602,82
04. Listrik dan Air Minum *Electricity, Gas and Water-supply*	**1.080,57**	**2.128,05**	**3.222,66**	**4.124,14**	**6.748,11**
05. B a n g u n a n / *Construction*	**27.313,51**	**36.767,74**	**42.632,11**	**53.088,37**	**61.714,21**
06. Perdagangan, Hotel dan Restoran *Trade, Hotels and Restaurants*	**46.809,78**	**61.806,22**	**75.591,75**	**98.336,31**	**126.910,79**
6.1. Perdagangan / *Trade and Commerce*	27.599,37	38.825,31	48.119,72	63.687,31	85.764,66
6.2. Hotel dan Pension *Hotel and Pension*	13.419,07	16.744,38	19.570,73	24.808,80	28.841,50
6.3. Restoran dan Warung *Restaurants and Shops*	5.791,34	6.236,53	7.901,30	9.840,20	12.304,63
07. Pengangkutan dan Komunikasi *Transportation and Communication*	**33.750,78**	**44.055,51**	**62.109,04**	**77.800,79**	**87.466,60**
7.1. Angkutan Darat / *Land Transportation*	17.272,07	20.816,85	30.342,90	36.148,70	34.038,87
7.2. Angkutan Laut / *Sea Transportation*	2.592,57	3.975,31	5.691,61	8.614,53	13.307,70
7.3. Angkutan Udara / *Air Transportation*	8.756,49	11.949,91	14.482,42	17.556,34	21.164,18
7.4. Jasa Penunjang Transport *Transportation Support Services*	3.208,80	4.662,63	8.331,61	9.172,98	10.537,85
7.5. Komunikasi / *Communication*	1.920,85	2.650,81	3.260,50	6.308,24	8.418,00
08. Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya *Banks and other Financial Intermediaries*	**4.683,44**	**6.889,84**	**10.805,76**	**14.723,90**	**18.955,66**
09. Sewa Rumah / *Ownership of Duelling*	**3.095,62**	**4.091,87**	**5.845,30**	**6.829,68**	**7.901,62**
10. Pemerintahan dan Pertahanan *Public Administration and Defence*	**25.433,67**	**38.518,58**	**51.815,12**	**67.517,22**	**77.855,50**
11. Jasa-jasa / *Services*	**42.984,45**	**47.887,86**	**55.417,84**	**64.262,23**	**82.224,66**
11.1. Jasa Perusahaan *Company Services*	283,94	374,30	463,89	501,47	631,37
11.2. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan *Social and Society Services*	3.053,03	3.690,18	4.568,46	5.769,34	8.856,97
11.3. Jasa Hiburan dan Kebudayaan *Entertainment and Culture*	1.030,33	1.180,03	1.379,70	1.726,38	1.899,54
11.4. Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga *Individual and Home services*	38.617,15	42.643,35	49.005,79	56.265,04	70.836,78
Produk Domestik Regional Bruto	354.162,72	485.997,97	599.184,30	739.891,32	904.945,64

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa dalam masa Pelita III terjadi pergeseran-pergeseran kegiatan perekonomian di Bali, yakni dari sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) ke sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintah dan hankam dan jasa-jasa).

Terjadinya pergeseran kegiatan perekonomian ini disebutkan sumbangan sektor primer terhadap pembentukan PDRB selama kurun waktu tersebut menurun dari 42,18% menjadi 37,26% sedangkan sektor sekunder dan tersier peranannya meningkat dari 57,19% menjadi 62,74% dan dari 44,50% menjadi 50,68% (1979-1984).

Namun dilihat dari keseluruhan sektor, walaupun sektor pertanian perkembangan prosentasenya menurun, namun tetap masih besar peranannya di dalam perekonomian Bali. Hal ini dapat dilihat pada peranan sektoral terhadap PDRB di Propinsi Bali, atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut :

a) Sektor Pertanian : 43,13%
b) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran : 14 [illegible]

e) Public Administration and Defence sector : 8,60%
f) Industrial sector : 8,62%
g) Construction sector : 6,82%

The increase of PDRB Bali was not only because of the increase of all development sectors, but principally it was a result of the increase of the PDRB in all the districts based on the current prices, especially the PDRB of the districts of Badung, Buleleng and Tabanan with their bigest role. The yearly average expansion was 29,64%, 16,86% and 12,38%, whereas for the other five districts : Jembrana, Gianyar, Karangasem, Klungkung and Bangli it was about 10,30%, 9,51%, 9,43%, 5,7% and 5,38%.

One of the indicators for the people's material/economic welfare up to now is merely the income per capita, i.e. the average Gross Regional Domestic Product (PDRB) or the Gross Domestic Product (PDB, Produk Domestik Bruto) divided by number of population in the middle of the year.

The income per capita and its increase could be used as an indicator of the level and development of welfare in a certain region. From the point of consumption view a higher level of income per capita means that the society could be able to own more commodities and services with higher quality.

Tabel / *Table III — 2*

DISTRIBUTION PERSENTASE PDRB PROPINSI BALI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975
PDRB PERCENTAGE DISTRIBUTION IN THE PROVINCE OF BALI BASED ON CONSTANT PRICE 1975

(Dalam Persentase / *In Percentage*)

Lapangan Usaha / *Sphere of action* (1)	1979 (2)	1980 (3)	1981 (4)	1982 (5)	1983 (6)	1984 (7)
01. Pertanian / *Agriculture*	**42,17**	**41,95**	**39,30**	**36,60**	**37,22**	**36,57**
1.1. Tanaman Bahan Makanan *Foodstuff*	31,59	31,05	28,81	26,91	26,24	28,19
1.2. Tanaman Perkebunan *Plantation*	2,61	2,78	2,65	1,86	3,80	1,83
1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya *Animal Husbandry and Products*	6,94	6,93	6,25	5,61	4,98	3,79
1.4. Kehutanan / *Forestry*	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01
1.5. Perikanan / *Fishery*	1,01	1,18	1,57	2,19	2,19	2,75
02. Pertambangan dan Penggalian *Mining and Quarrying*	**0,64**	**0,63**	**0,58**	**0,72**	**0,66**	**0,69**
03. Industri / *Industry*	**4,28**	**4,45**	**5,15**	**5,67**	**5,30**	**5,17**
3.1. Industri Besar dan Sedang *Heavy and Medium Industry*	1,96	1,72	1,79	1,86	1,70	1,65
3.2. Industri Kecil / *Light Industry*	1,18	1,39	1,54	1,93	1,81	1,77
3.3. Kerajinan Rumah Tangga *Home Industry*	1,13	1,35	1,82	1,88	1,79	1,75
04. Listrik, Gas dan Air Minum *Electricity, Gas and Water-supply*	**0,33**	**0,44**	**0,50**	**0,56**	**0,77**	**0,75**
05. Bangunan / *Construction*	**8,08**	**8,49**	**7,76**	**7,35**	**6,70**	**6,14**
06. Perdagangan, Hotel dan Restoran *Trade, Hotels and Restaurants*	**13,01**	**12,65**	**12,06**	**12,65**	**13,86**	**15,49**
6.1. Perdagangan / *Trade and Commerce*	7,47	7,54	7,21	7,81	9,02	10,30
6.2. Hotel dan Pension *Hotel and Pension*	4,01	3,77	3,45	3,30	3,14	3,15
6.3. Restauran dan Warung *Restaurants and Shops*	1,54	1,34	1,40	1,54	1,70	2,04
07. Pengangkutan dan Komunikasi *Transportation and Communication*	**9,52**	**9,28**	**11,16**	**12,11**	**11,25**	**11,49**
7.1. Angkutan Darat / *Land Transportation*	5,06	4,38	5,38	5,75	4,72	4,78
7.2. Angkutan Laut / *Sea Transportation*	0,76	0,88	0,99	1,24	1,58	1,53
7.3. Angkutan Udara / *Air Transportation*	2,36	2,54	2,83	2,92	2,67	2,88
7.4. Jasa Penunjang Transport *Transportation Support Services*	0,92	1,03	1,46	1,40	1,41	1,42
7.5. Komunikasi / *Communication*	0,47	0,46	0,50	0,80	0,87	0,88
08. Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya *Banks and other Financial Intermediaries*	**1,37**	**1,52**	**1,90**	**2,30**	**2,36**	**2,44**
09. Sewa Rumah / *Ownership of Dwelling*	**0,97**	**0,97**	**0,95**	**0,87**	**0,78**	**0,73**
10. Pemerintahan dan Pertahanan *Public Administration and Defence*	**6,71**	**7,57**	**8,86**	**9,65**	**9,58**	**8,80**
11. Jasa-jasa / *Services*	**12,97**	**12,14**	**11,78**	**11,52**	**11,52**	**11,73**
11.1. Jasa Perusahaan / *Company Services*	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
11.2. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan *Social and society services*	0,87	0,94	0,93	1,08	1,26	1,17
11.3. Jasa Hiburan dan Kebudayaan *Entertainment and Culture*	0,29	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20
11.4. Jasa Perseorangan dan Rumah Tangga *Individual and Home Services*	11,73	10,85	10,53	10,13	9,97	10,27
Produk Domestik Regional Bruto / *PDRB*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

c) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi : 9,67%
d) Sektor Jasa-jasa : 9,09%
e) Sektor Pemerintahan dan Pertahanan : 8,60%
f) Sektor Industri : 8,62%
g) Sektor Bangunan : 6,82%

Peningkatan PDRB Bali selain diakibatkan oleh adanya peningkatan di semua sektor pembangunan, pada hakekatnya juga merupakan akibat dari meningkatnya PDRB di masing-masing Kabupaten se Bali atas dasar harga berlaku, terbesar peranannya terhadap PDRB Bali adalah PDRB Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Dan rata-rata perkembangannya per tahun adalah sebesar 29,64%, 16,86% dan 12,38%. Sedangkan untuk 5 Kabupaten lainnya seperti : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli pertumbuhannya hanya berkisar 10,30%, 9,51%, 9,43%, 5,7% dan 5,38%.

Salah satu indikator kesejahteraan material/ekonomi bagi penduduk yang selama ini sering dipakai adalah pendapatan per kapita. Yang dimaksud dengan pendapatan per kapita dalam hal ini adalah rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ataupun Produk Domestik Bruto (PDRB) dibagi dengan penduduk pertengahan tahun.

Besarnya pendapatan per kapita dan laju pertumbuhannya dapat merupakan indikator yang menunjukkan tingkat dan perkembangan kemakmuran di suatu daerah, sebab apabila dilihat dari sudut kon-

The development of PDRB per capita in Bali in some periods of the Pelita had increased by the years.

As we could see in the periode of Pelita I the average PDRB per capita increased to Rp6,526 (28,94%), and in Pelita II to about Rp14,380 (22,75%). A greater increase could be observed during Pelita III with an average increase of PDRB per capita to 22,29% per year. The highest increase was in the period of 1982-1983 with an amount of Rp60,238,-. Considering the real PDRB per capita from which the very unstable price elements had been taken out so that it could indicate the purchasing power of the society, it seemed that it had increased from Rp97,772 to Rp163,520,- (1979-1984). This meant an average increase of a real PDRB per capita to 11,82% per year (See Table III-3). This real income per capita of the Balinese population was far ahead of the population growth which was only 1,4% per year. This meant that the welfare of the Balinese population in economic matters had increased by the years during those periods.

The ratio between the level of development achievements in Bali and the national achievement level could be seen in the ratio between the amount of PDRB per capita in Bali and the national PDB per capita. The development of PDRB per capita in Bali and the national PDB per capita in the periode of 1979-1983 could be seen as an example (See Graph-1).

From this Graph it could be seen that in the period of 1979-19822 the National PDB per capita (without oil) was still higher than the PDRB per

sumsi dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi berarti masyarakat akan mempunyai kemampuan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak ataupun yang lebih tinggi kualitasnya.

Perkembangan PDRB per kapita Bali selama beberapa periode Pelita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana dapat dilihat dalam periode Pelita I PDRB per kapita Bali rata-rata naik Rp 6.526 (28,94%), kemudian dalam Pelita II rata-rata kenaikan sebesar Rp 14.380 (22,75%). Dan yang lebih menonjol peningkatannya adalah selama Pelita III yakni kenaikan PDRB per kapita rata-rata 22,29% per tahun. Dan yang paling besar peningkatannya terjadi sekitar periode 1982-1983 yaitu sebesar Rp 60.238,-. Bila diperhatikan PDRB per kapita riil, dimana unsur gejolak harga sudah dikeluarkan sehingga memberikan cerminan daya beli masyarakat, rupanya mengalami peningkatan pula yakni dari Rp 97.772 menjadi Rp 163.520,- (1979-1984). Berarti kenaikan PDRB per kapita riil rata-rata sebesar 11,82% per tahun (lihat Tabel III-3). Dari sini terlihat bahwa rata-rata kenaikan riil PDRB per kapita penduduk Bali jauh di atas laju pertumbuhan penduduknya yang hanya sekitar 1,4% per tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kesejahteraan penduduk Bali secara ekonomis meningkat dari tahun ke tahun selama periode-periode tersebut.

Perbandingan tingkat keberhasilan pembangunan daerah Bali dengan tingkat keberhasilan pembangunan secara Nasional dapat dilihat dengan membandingkan besarnya PDRB per kapita Bali dengan PDB per kapita Nasional.

Sebagai contoh dapat dilihat perkembangan PDRB per kapita Bali dan PDB per kapita Nasional dalam kurun waktu 1979-1983 (lihat grafik-1).

capita in Bali, in which it was varied between 85,99% and 99,89% of the National PDB per capita. Whereas in 1983 the PDRB per capita in Bali was already much higher than the National PDB (not including oil) i.e. 102,93%. Successively the National PDB per capita (not including oil) in 1979 was Rp171,045,- in 1980 was Rp225,499,- in 1981 was Rp266,285,- in 1982 was Rp292,412,- and in 1983 was Rp342,440,- The successive amount of PDRB per capita in Bali for the same years were Rp147,085,-, Rp197,892,- Rp239,907,-, Rp292,077,- and Rp352,465,-.

The PDRB per capita in Bali was much lower if we compared with the National PDB per capita included oil, but if we observed it from the point of time period it showed a yearly increase. As an example, in 1979 the PDRB per capita in Bali from 65,70% of the National PDB per capita (included oil) increase to 77,39% in 1983 and this meant an average yearly increase of about 69,64%.

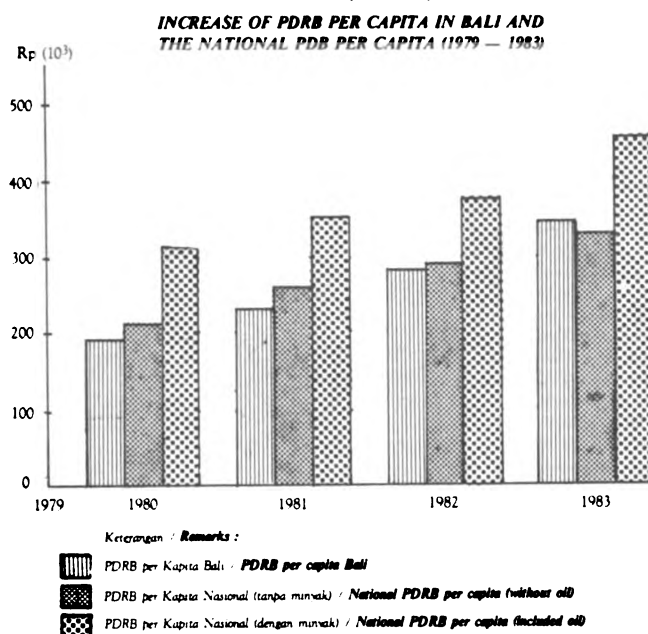
To know the level of development achievement which had been executed it could be done by means of comparison between the PDRB per capita of the Province of Bali with the PDRB per capita of the districts. This image could be used for the future planning as well as the evaluation of the development achievement reached so far. Besides the position of achievement levels in every district could be observed which at the same time could be utilize for the allocation of funds in support of the intensity of development in all the districts.

In the period of Repelita IV it is assumed that only 6% per year can be reached beside the effort to intensify the modification of the economic structure in Bali so that it will be more in balance, i.e. to make the development of the non-agricultural sectors greater than that of the agricultural sector.

GRAFIK III-1

PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA BALI DENGAN PDRB PER KAPITA/ NASIONAL (1979-1983)

INCREASE OF PDRB PER CAPITA IN BALI AND THE NATIONAL PDB PER CAPITA (1979 — 1983)



Tabel / *Table III — 3*

PDRB PER KAPITA PROPINSI BALI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KABUPATEN SE-BALI

RATIO BETWEEN PDRB PER CAPITA IN THE PROVINCE BALI AND ALL THE DISTRICTS IN BALI

(Dalam Jutaan Rupiah / *In Million Rupiahs*) Tahun / *Number*

	Tahun / *Year* — Uraian/ *Explanation*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1.	Jembrana	158.287,36	211.737,47	235.046,61	320.374,85	434.760,11	492.958,70
2.	Tabanan	140.618,85	186.325,56	224.924,85	240.360,88	293.187,55	326.129,26
3.	Badung	210.706,15	278.573,59	333.751,69	444.701,56	515.854,39	603.908,03
4.	Gianyar	129.689,45	172.030,94	180.489,63	232.146,57	273.425,06	391.795,44
5.	Klungkung	153.723,04	219.976,88	232.100,61	276.240,87	342.867,98	420.529,81
6.	Bengli	140.335,91	199.881,90	212.574,70	242.715,54	289.835,48	375.932,39
7.	Karangasem	119.369,35	157.125,56	195.006,37	229.576,07	260.576,96	335.417,32
8.	Buleleng	110.716,25	152.037,11	232.423,91	255.457,34	317.574,75	348.617,64
	B a l i	147.085,60	197.892,14	239.906,72	292.226,09	352.464,53	420.992,32

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada periode 1979-1982 PDB per kapita Nasional (tanpa minyak bumi) masih lebih tinggi daripada PDRB per kapita Bali, dimana PDRB per kapita Bali bervariasi antara 85,99% sampai dengan 99,89% dari PDB per kapita Nasional. Sedangkan dalam tahun 1983 PDRB per kapita Bali sudah jauh lebih tinggi dari PDB per kapita Nasional (tanpa minyak bumi) yaitu sebesar 102,93%. Berturut-turut PDB per kapita Nasional (tanpa minyak bumi) sebesar Rp171.045,- pada tahun 1979, Rp225.499,- pada tahun 1980, Rp 266.285,- pada tahun 1981, Rp 292.412,- pada tahun 1982 dan Rp 342.440,- pada tahun 1983. Dalam tahun yang sama PDRB per kapita Bali berturut-turut sebesar Rp 147.085, Rp 197.892, Rp 239.907, Rp 292.077 dan Rp 352.465,-.

Apabila dibandingkan dengan PDRB per kapita Nasional termasuk minyak bumi didalamnya, maka PDRB per kapita Bali ternyata lebih rendah, namun bila dilihat kecenderungannya dalam kurun waktu tersebut menunjukkan adanya suatu peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh dalam tahun 1979 PDRB per kapita Bali sebesar 65,70% dari PDB per kapita Nasional (termasuk minyak bumi) meningkat menjadi 77,39% pada tahun 1983 dan jika dilihat secara rata-rata per tahun masih berkisar sekitar 69,64%. Dan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, dapat diketahui dengan membandingkan PDRB per kapita Propinsi Bali dengan PDRB per kapita Kabupaten. Gambaran tersebut dapat berguna untuk perencanaan maupun untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Disamping itu akan dapat dilihat posisi tingkat keberhasilan dari masing-masing Kabupaten yang sekaligus dapat bermanfaat dalam pengalokasian dana-dana pembangunan dalam memacu laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten-kabupaten tersebut.

Selama Repelita IV diperkirakan hanya akan dapat mencapai sekitar 6% setahun, juga diusahakan peningkatan perubahan struktur perekonomian daerah Bali agar lebih seimbang, yakni dengan jalan mengusahakan agar laju pertumbuhan sektor-sektor non pertanian lebih besar dari laju pertumbuhan sektor pertanian. Sehingga dengan demikian peranan sektor pertanian pada akhir Pelita IV menurun menjadi 31,68% dan peranan sektor-sektor non pertanian meningkat menjadi 68,32%. Dan untuk mencapai sasaran laju pertumbuhan tersebut, maka investasi selama Repelita IV ditingkatkan sekitar 15% sampai dengan 18,42% setahun.

1. Pertanian dan Irigasi

Bali merupakan daerah dengan struktur yang agraris, artinya bahwa sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian dalam arti luas, yang meliputi : pertanian pangan, perekebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Dengan jumlah penduduk sekitar 85,3% bermukim di pedesaan maka pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan prioritas utama Daerah Bali.
Pembangunan pertanian dalam arti luas terus ditingkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertaian guna memenuhi kebutuhan pangan dan keperluan industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan lain sebagainya. Dalam rangka menuju swasembada pangan telah dilaksanakan usaha peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

a. Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian khususnya usaha peningkatan produksi tanaman pangan di Propinsi Dati I Bali diarahkan untuk ikut serta dalam penyediaan stock nasional, juga untuk memenuhi keperluan daerah Bali sendiri.

Secara umum penyediaan pangan daerah Bali telah melebihi standar kecukupan nasional, karena usaha peningkatan produksi tanaman pangan yang dirintis sejak Pelita I sampai sekarang telah cukup menggembirakan hasilnya.

Kegiatan-kegiatan sub sektor ini meliputi peningkatan produksi komoditi padi, jagung, palawija serta hortikultura. Untuk mencapai peningkatan tersebut dilaksanakan usaha ekstensifikasi bagi daerah-daerah yang memungkinkan untuk perluasan dan intensifikasi peningkatan produktivitas bagi setiap sektor produksi pangan seperti perbaikan dan peningkatan Sapta Usaha Tani, diversifikasi dan mekanisasi di bidang pertanian.

Untuk mengetahui adanya peningkatan produksi tanaman pangan ini dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan/peningkatan produksi beras per tahun selama Pelita I adalah sebesar 5,25% atau 15.230 ton, sedangkan jagung sebesar 12,03% atau 6.537 ton, umbi-umbian sebesar 2,9% atau 8.378 ton dan kacang-kacangan sebanyak 3,04% atau 403 ton.

Selama Pelita II produksi besar per tahun meningkat sebesar 2,93% atau 8.455 ton, akan tetapi komoditi jagung dan umbi-umbian

So the role of the agricultural sector will decrease to 31.68% at the end of Pelita IV and the role of the non-agriculture sectors shall increase to 68,32%. And to achieve those development targets, the investment of about 15% will be increased till 18,42% per year in the period of Repelita IV.

1. Agriculture and Irrigation

Bali is a region with an agricultural structure. So the means of support of the majority of the population is in a broad sense the agricultural sector, which includes Foodstuff agriculture, plantations, fishery, Animal Husbandry and Forestry. With 85,3% of the population living in rural areas the development of agriculture and villages in first priority in Bali.

The development of the agriculture in a broad sense has to be increased continuously with the aim to increase agricultural production to fulfill the need for food and the requirements of the domestic industry, to intensify export, to expand employment opportunities, to motivate equity in trade opportunities and so on. In the frame-work to be selfsupporting in food, efforts have been made to increase the Foodstuff and Horticulture plantations, the Animal Husbandry and the fishery.

a. Food Crops Agriculture

The agricultural development, in particular the efforts to increase Food Crops production, in the Province of Bali has been aimed to participate in the establishmend of the national food stock and to fulfill own needs in Bali.

The food stock in Bali generally exceeds the national stock standard as the result of the increase of food crops production, which has established successfully since Pelita I until today.

The activities of this sub-sector include the increase of rice, maize, nonstaple food crops (palawija) and horticulture. To achieve those, increasing efforts have been made in the extensification of suitable regions to expand and to intensify the degree of productivity for every foodstuff production factor so as to restore and to upgrade the "Panca Usaha Tani" (Farmer's Five Efforts), and to execute the diversification and mechanization in the agricultural sector.

To increase of food crops production can be seen from the yearly average development progress. The increase of rice production in the period of Pelita I was 5,25% or 15,230 tons, whereas maize was 12,03% or 6,537 tons, edible roots was 2,9% or 8,378 tons and beans was 3,04% or 403 tons.

During Pelita II the yearly rice production increased to 2,93% or 8,445 tons, but on the other hand the commodities of maize and edible roots had decreased about 0,57% and 1,36% (1,423 tons and 12,392 tons). The beans production however increased to 6,37% or about 1,015 tons.

The policy during Pelita III called for special efforts in the Food crops agriculture sub-sector, among other things to develop the nonstaple food crops and horticulture commodities and to expand the areas and intensification quality of rice crops. Besides to expand the area by means of an efficient utilization of land with many more varieties of short life rice, to carry out a multiple crop system and efficient use of water, to perfect the system of preventing and killing of pest, to complete the farmer's initiative system and to increase the nutrition rate (See Table III-4).

From Table III-4 we can see the comparison of field rice production (1980 and 1981) which increased to 22,188 tons of unhulled rice or about 3,09%. This increase was a result of the execution of intensification in quantity as well as in quality.

In those two years wet rice had decreased to 19,79% or 17,19 tons of dry unhulled rice (from 8,688 tons to 6,969 tons). This decrease was a result of the decrease of areas which were pushed aside by maize crops. So the maize production increased to 2,23% as a result of bigger crops.

Based on total milled rice production in all the regions of Bali, the rice stock in 1981 was 463,849 tons. If this amount would by compared with the total consumption of 372,375 tons, there would be a surplus of 91,474 tons of rice production.

In contradiction with the maize production, the production of edible roots, peanuts and green peas in 1980 - 1981 had decreased. The production of peanuts decreased to 24,07% as a result of the average production increase which could not compensate with the diminished crops areas, whereas the green peas production decreased to 74,49% because of the drastical decrease of crops area and also because of the average decrease of its production. Next came the soy beans with an increase of 16,59% as a result of increase in crops area and average production per Hectare.

The role of the intensification as the main activity in the production increase programme had developed, because of the increased technology beside the development of the production facilities. The intensification development of rice, nonstaple food crops and vegetables, See Table III-5.

In the planting season of 1981 the intensification of rice was 124,81%, nonstaple food crops 150,30% and vegetables 76,93%. In 1981/1982 the intensification of rice was 112,85%, nonstaple food crops 155,32% and vegetables 110,82%. In the 1982 planting season the intensification of rice increased to 116,65%, nonstaple food crops to 121% and vegetables to 83,16%.

mengalami penurunan sekitar 0,57% dan 1,36% (1.423 ton dan 12.392 ton). Dan seperti halnya produksi beras, maka produksi kacang-kacangan selama Pelita II mengalami peningkatan sebesar 6,37% atau sekitar 1.015 ton.

Dalam Pelita III ditetapkan kebijaksanaan serta langkah-langkah khususnya untuk sub sektor pertanian tanaman pangan ini, antara lain dengan pengembangan komoditi palawija dan hortikultura serta peningkatan areal dan mutu intensifikasi tanaman padi. Disamping itu perluasan areal melalui effisiensi penggunaan tanah yang dilaksanakan dengan menggunakan lebih banyak varietas padi berumur pendek, penerapan sistem multiple cropping dan effisiensi penggunaan air, menyempurnakan sistem pencegahan dan pemberantasan hama, menyempurnakan sistem atau pola usaha tani serta mengadakan perbaikan gizi. Lihat Tabel III-4.

The development of Inmas (Mass Intensification for Self-sufficiency in Food) was far ahead of the planning but on the other hand the Bimas (Mass Guidance for self-sufficiency in Food) was still unsatisfactory. Among other things this was becaue of :

a) the fast and easy procedure to get Inmas vegetable fertilizer,

b) the many delinquency in repayment of credits so that it affected the following Bimas credits and

c) the delay's in services for the Bimas.

With regard to the development and succesful intensification, other factors like the distribution system of fertilizer, pesticides and seeds often had been executed ahead of the existing plan. But in the period of Pelita III destructions often occured as a result of pest and natural disasters (See Table III-6).

Tabel / *Table III — 4*

PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN
INCREASE OF FOOD CROPS PRODUCTION

No.	Jenis Tanaman *Plant*	Akhir Pelita II *End of Pelita II*	*Pelita III*				*Increase/Decrease* Kenaikan/Penurunan (%)
			1979	1980	1981	1982	
1.	Padi / *Rice*						
	Padi Sawah *Field rice*	564.060	633.822	717.187	739.375	849.180	+ 10,87
	Padi Gogo *Dry rice*	9.377	9.595	8.688	6.969	8.177	— 2,29
2.	Palawija/ *Non-staple food crops*						
	- Jagung *Maize*	71.637	78.527	84.024	88.072	9.352	+ 6,58
	- Ubi Kayu *Cassava*	194.077	322.557	290.125	270.260	296.421	+ 14,75
	- Ubi Jalar *Sweet potato*	148.238	159.264	126.846	123.317	146.549	+ 0,79
	K. Tanah *Pea nuts*	11.660	14.827	15.832	12.021	12.512	+ 3,49
	K. Kedele *Soy beans*	8.657	9.407	9.292	10.834	7.664	+ 1,31
	K. Hijau *Green peas*	2.126	2.343	3.074	784	1.643	--
3.	Sayuran *Vegetable*	44.407	33.177	34.567	25.777	33.141	— 4,49
4.	Buah-buahan *Fruits*	118.833	82.341	260.353	190.081	263.291	+ 49,25

Dari Tabel III-4 tersebut dapat dilihat untuk perbandingan produksi padi sawah (tahun 1980 dan 1981) terjadi peningkatan sebesar 22,188 ton gabah kering giling atau sekitar 3,09%. Peningkatan produksi tersebut disebabkan mantapnya pelaksanaan intensifikasi, baik jumlah maupun mutunya. Sedangkan untuk padi gogo dalam dua tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 19,79% atau 17,19 ton gabah kering (dari 8.688 ton menjadi 6.969 ton). Dan penurunan ini antara lain disebabkan karena menurunnya areal, yang didesak oleh tanaman jagung. Tetapi produski jagung menunjukkan peningkatan sebesar 2,23% yang disebabkan dengan adanya peningkatan luas panennya.

Atas dasar produksi padi giling total seluruh Bali, maka persediaan beras dalam tahun 1981 sebesar 463.849 ton dan bila dibandingkan dengan jumlah konsumsi sebesar 372.375 ton, maka terdapat kelebihan produksi beras sebesar 91,474 ton.

Berbeda dengan produksi jagung, maka produksi umbi-umbian, kacang tanah dan kacang hijau dalam tahun-tahun tersebut (1980-1981) terjadi penurunan. Produksi kacang tanah menurun sebesar 24,70% sebagai akibat dari adanya kenaikan rata-rata produksi yang tidak dapat mengimbangi turunnya areal panen, sedangkan produksi kacang hijau menurun sebesar 74,49% yang diakibatkan menurunnya secara drastis luas panennya, disamping juga adanya penurunan rata-rata produksinya. Kemudian kacang kedele mengalami kenaikan sebesar 16,59% yang disebabkan adanya kenaikan luas panen dengan rata-rata produksi per hektar.

Peranan intensifikasi sebagai kegiatan utama dalam program peningkatan produksi terlihat semakin berkembang, karena adanya perkembangan teknologi disamping telah berkembangnya pengadaan sarana/prasarana produksi. Lihat Tabel III-5.

Dalam musim tanam 1981 intensifikasi padi 124,81%, palawija 150,30% dan intensifikasi savur mavur 76,93%. Musim tanam 1981/1982 intensifikasi padi 112,85%, palawija 155,32% dan sayur-sayuran

To maintain the increase of production the establishment of Institutions had to be found necessary. Since Pelita I until the third year of Pelita III in Bali had been formed :

a) 3 BBI institutions/seed nurscry,
(BBI in Pegok, in Banyupoh and in Luwus),

b) 27 BPP institutions/Field Instruction Centres,

c) 298 WKP institutions, with 15 PPS-members, 70 PPM-members and 909 PPL-members/Field instructors.
Every PPL had to found 1 WKPP and 1 PPL member had at least to renovate 16 farmer's contact members from which it had to be hoped that 1 member could influence 5 farmer-partners,

d) 1 BPT institute with its location in the Agriculture Office in the Province of Bali.

In Repelita IV every effort to increase production of any food commodities has been made to fulfill the requirement of developments. The target of foodstuff production had been planned based on the available land, taking into consideration the environment protection so that the land productivity can be maintain continuously (See Table III-7).

From that standpoint the production increase of rice commodities were merely achievements of the average production development per Hectare, whereas the area decreased to make place for the development of nonstaple food crops commodities and at the same time to alternate the kind of plants as an effort to establish a good planting system.

b. Plantation

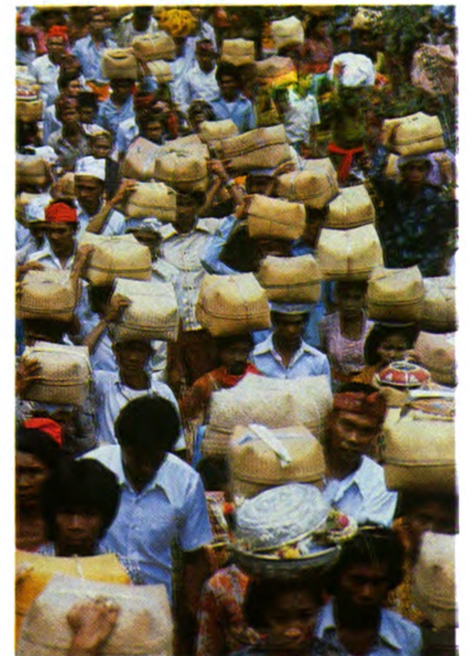
Plantation is an important sub-sector of the economy in the Province of Bali. From the point of its activity view, it can be divided into two parts, i.e. private big plantation (2%) and the smallholders plantations. There are 8 kinds of plants in this plantations, i.e. coconuts, coffee, vanilla, cloves, cashews, capoc, people's tobacco and virginia tobacco which development can be observed in Table III-8 and III-9.



Rangkaian upacara keagamaan merupakan satu di antara daya tarik obyek wisata di Bali. Upacara Ngaben (pembakaran mayat) seperti disuguhkan di bawah, disamping banyak diminati turis asing, juga oleh turis domestik. Gambar kiri menampilkan kegiatan Presiden Soeharto ketika menandai berlangsungnya salah satu upacara keagamaan, didampingi Gubernur Bali, Prof Ida Bagus Mantra.

The religious rituals in Bali island such as the Ngaben cremation ceremony is one of the most attractive tourist object. More domestic and foreign tourists come to Bali to see the Ngaben ceremony. Seen in the left picture President Soeharto and the Governor of Bali Prof Ida Bagus Mantra witnessing a religious ceremony.













Berbagai arsitektur bangunan di Bali banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Budha. Dengan ciri ukiran yang tinggi seninya, memperlihatkan keindahan dan keunikan tersendiri. Contoh beberapa bangunan pemerintah yang memanfaatkan seni itu tergambar dalam foto ini.

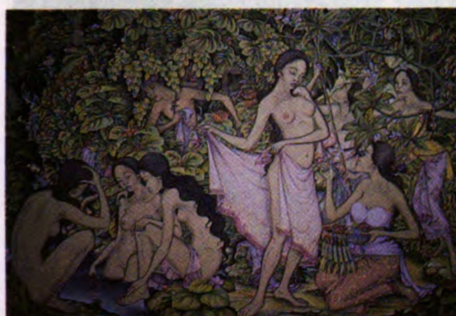
Various monuments in Bali island are very much influenced by the Hindu and Buddhist architecture. The sculptural arts in Bali is noted for its high quality. Seen in the picture a number of government buildings with Bali-model carving.











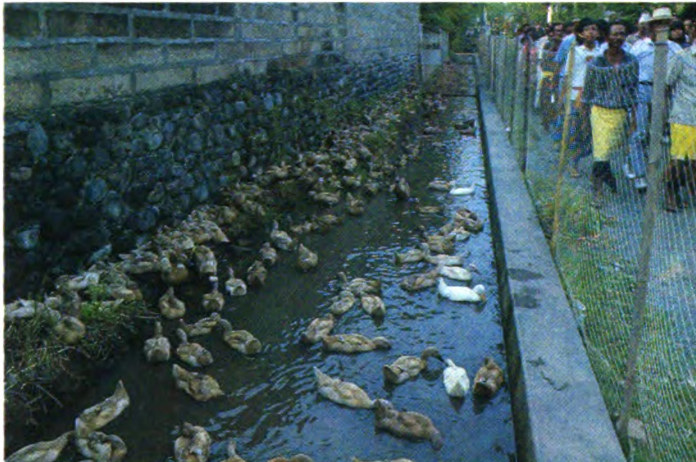
Tujuh puluh lima persen pembangunan sektor industri yang tumbuh dan berkembang di Bali adalah industri kerajinan rakyat. Dalam hubungan inilah Pemda setempat terus mengarahkan untuk meningkatkan dan lebih mempercepat pertumbuhannya demi terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang. Meskipun jenis, corak dan desain berbeda-beda, tetapi umumnya mempunyai satu persamaan prinsip, yakni berdasarkan pada unsur keagamaan dan budaya. Di Bali banyak tumbuh seniman patung, hiasan seni kayu, anyaman, lukis, ukir tulang/gading/tanduk/batok kelapa, kerajinan kuningan, alumunium dan keramik. Beberapa foto yang ditampilkan pada halaman ini adalah contoh dari beberapa industri hasil kerajinan rakyat khas Bali.

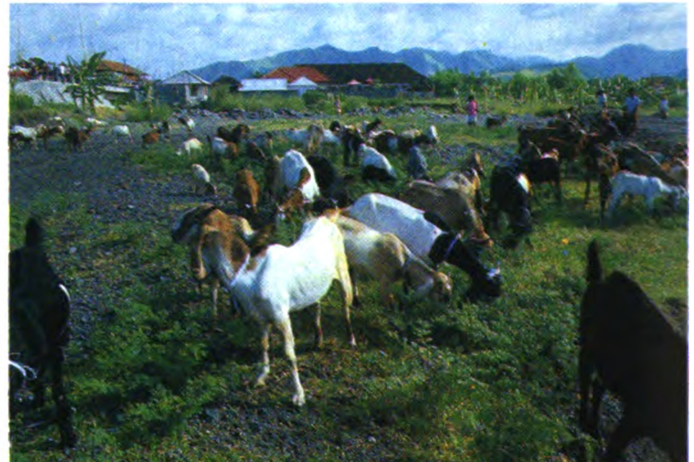
The cottage industry holds the dominant position (about 75 per cent) among the existing industries in Bali. The Local Government has succeeded in promoting the local industries in order to create a more balanced economic structure. The religious and cultural elements are visualized in the products of cottage industry. Bali is an island of artists, sculptors, carvers and craftmen. Seen in the pictures on this page a number of industrial cottage products.



Kendati usaha peternakan sebagian besar masih bersifat tradisional, artinya penggunaan teknologi modern masih sangat terbatas, namun hasilnya cukup memadai. Untuk itulah pembangunannya diarahkan pada tercapainya peningkatan populasi, produktivitas, kualitas serta pendapatan petani dan kesempatan kerja. Disamping ayam, itik dan kambing (seperti nampak dalam gambar) masih banyak lagi jenis hewan ternak lainnya yang dibudidayakan.

Livestock produce in Bali is moderate enough altough the method of breeding is still traditional in nature. The government policy in the field of cattle breeding is aimed at increasing livestock population, its productivity and quality, farmer's income and employment opportunity. Beside the poultry and goat breeding there are some kinds of animals that have been promoted to breed.







Pulau Dewata Bali, bukan hanya keindahan alamnya yang menarik para wisatawan. Lebih dari itu, adalah aspek kehidupan rakyat Bali, seperti agama, seni budaya, kesusasteraan dan adat istiadat. Rangkaian foto ini mewakili Bali sebagaimana disebutkan itu.

Bali or what is usually called the Island of Dewata (god) is not only wellknown for its beautiful scenery which attracts the attention of tourists but also the traditional life of its people, its culture, literature an customs. The following photoes show the livelihood of the people of Bali as mentioned above.











Jika lahan pertanian menghijau di Bali, jangan heran. Sebuah organisasi petani yang maju, khususnya dengan sistem pengairannya (Subak), telah lama dikenal di Bali. Sebelum mereka terjun ke sawah, kelompok tani mendahuluinya dengan beberapa petunjuk seperti nampak pada gambar. Subak, selain mengatur sistem irigasi yang tepat guna untuk persawahan, juga pertambakan untuk ternak ikan. Dengan sistem Subak, petani tak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan air untuk pertanian.

The advanced farming in Bali could be achieved thanks to the efficient "Subak" irrigation system. Seen in the picture Head of farmers group giving guidance to its members before doing their job. It is through the "Subak" system that the distribution of water for the rice field and fish pond are regulated. This system can deal with the handicaps faced by the farmers to get water for the irrigation of rice-field.

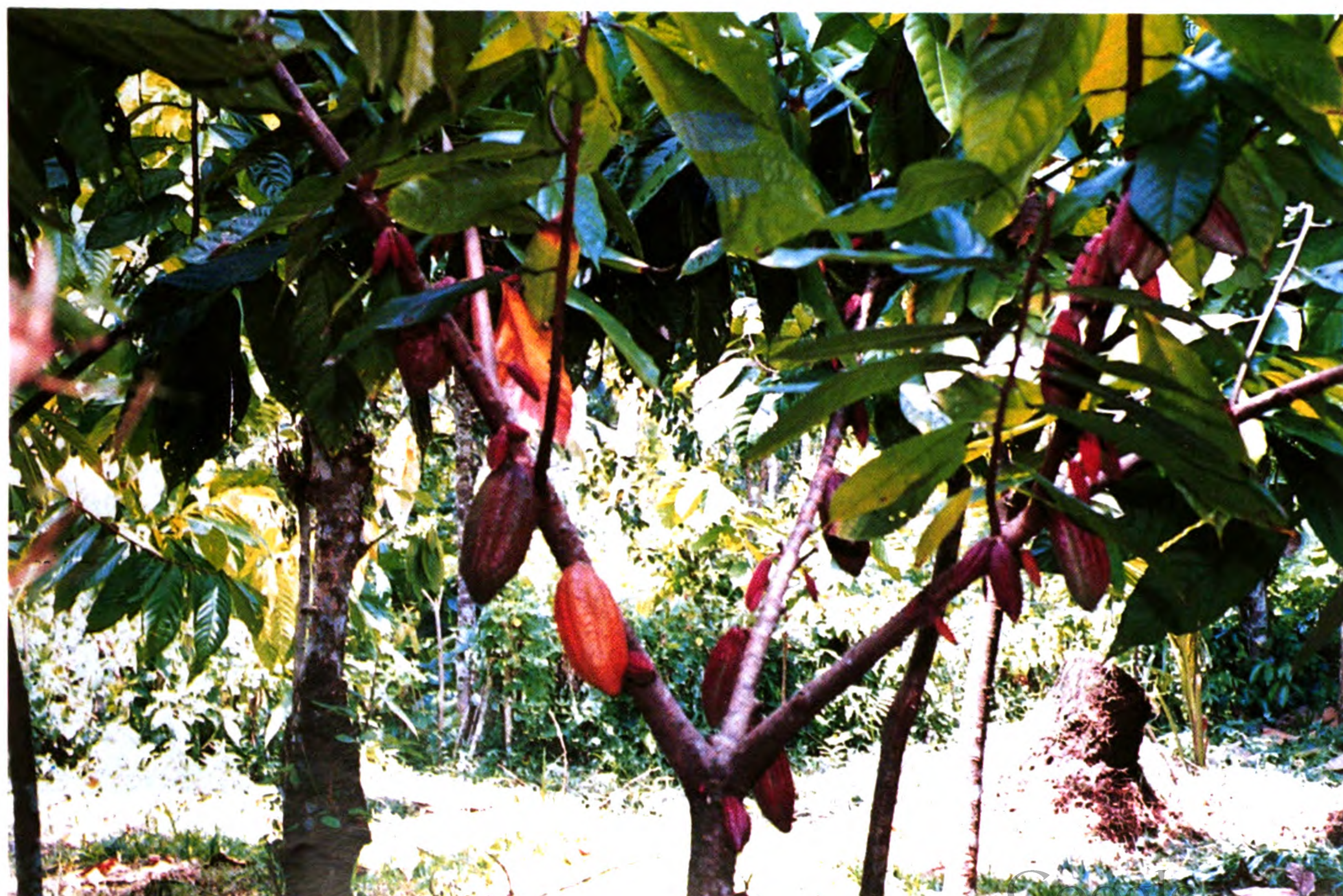


Dipandang dari segi pengusahaannya, sub sektor perkebunan pada dasarnya penting peranannya dalam perekonomian Bali. Kopi, cengkeh dan coklat, umumnya ditangani oleh "perkebunan swasta". Antara dua jenis pengusahaan perkebunan tadi, masing-masing mampu menunjukkan keberadaannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerahnya. Khusus salak sebagai contoh, menampilkan Bali sebagai penghasil yang terkenal.

Plantation subsector is vital to the economic growth in Bali. Among the important plantation products are coffee, clove and chocolate which are generally managed by the private plantations whereas some crops such as salak (Zalacca Blumeana), coconut, tobacco, cashew kapok and vanilla are cultivated by the people's estate. The salak fruit from Bali is well-known throughout Indonesia.









Hotel-hotel di Bali.

Some hotels in Bali.







Tabel / *Table III — 5*

SASARAN DAN REALISASI AREAL INTENSIFIKASI PADI, PALAWIJA DAN SAYURAN

AREA — INTENSIFICATION PLANNING AND REALIZATION OF RICE, NONSTAPLE FOOD CROPS (PALAWIJA) AND VEGETABLES

No.	Jenis Intensifikasi / *Kind of Intensification*	Tahun anggaran / *Fiscal Year 1981/1982* — M.T. 1981: Rencana (Ha) *Planning*	M.T. 1981: Realisasi (Ha) *Realization*	M.T. 1981: %	M.T. 1981/1982: Rencana (Ha) *Planning*	M.T. 1981/1982: Realisasi (Ha) *Realization*	M.T. 1981/1982: %	Jumlah: Rencana (Ha) *Planning*	Jumlah: Realisasi (Ha) *Realization*	Jumlah: %	M.T. 1982: Rencana (Ha) *Planning*	M.T. 1982: Realisasi (Ha) *Realization*	M.T. 1982: %
I.	Padi Sawah / *Field rice*	61.700	77.562	125,71	84.600	95.885	113,34	146.300	173.447	118,56	62.550	73.356	17,28
	1. Insus / *Special Intensification*	28.300	34.706	122,64	41.400	43.450	104,95	69.700	78.156	112,13	30.450	32.742	107,53
	· Bimas Baru / *New Bimas*	26.500	30.038	113,35	38.350	36.086	99,27	62.850	66.124	105,21	27.250	28.214	103,16
	· Inmas Baru / *New Inmas*	1.800	4.668	259,33	5.050	7.364	145,82	6.850	12.032	175,65	3.100	4.528	146,06
	Inmum/ *General Intensification*	33.400	42.856	128,31	43.200	52.435	121,38	76.600	95.291	124,40	32.100	40.614	126,52
	· Bimas Baru / *New Bimas*	12.650	12.390	97,94	15.700	14.593	92,95	28.350	26.983	95,52	12.450	10.972	88,13
	· Bimas Biasa / *Bimas*	4.750	3.182	66,99	6.700	1.783	26,81	11.450	4.985	43,36	4.250	2.234	52,58
	· Inmas Baru / *New Inmas*	13.850	23.537	169,95	17.200	29.703	172,69	31.050	53.240	171,47	12.750	23,698	185,87
	· Inmas Biasa / *Inmas*	2.150	3.747	174,28	3.600	6.356	176,56	5.750	10.103	175,70	2.650	3.710	140,00
II.	Padi Gogo / *Dry rice*	800	443	55,37	400	35	6,75	1.243	478	38,46	1.000	773	77,30
	· Bimas / *Bimas*	500	238	47,6	300	10	3,33	800	248	31,00	600	325	54,16
	· Inmas / *Inmas*	300	205	68,33	100	25	25,00	400	230	57,50	400	448	112,00
III.	Jumlah Padi / *Total*	62.500	78.005	124,81	85.000	95.920	112,85	147.500	173.925	17,92	63.500	74.129	116,65
IV.	Palawija / *Nonstaple food crops*	7.100	10.671	150,30	7.450	11.571	155,32	14.550	22.242	152,87	7.675	9.287	121,00
	1. Bimas / *Bimas*	4.575	2.298	50,23	6.850	8.290	121,02	11.425	10.588	92,67	3.625	2.043	56,36
	· Jagung / *Maize*	2.425	1.818	74,92	4.650	6.889	148,15	7.075	8.707	123,07	1.875	1.385	73,87
	· Kacang tanah / *Pea nuts*	950	307	32,31	1.350	975	72,22	2.300	1.282	55,74	1.000	340	34,00
	· Kedele / *Soya beans*	1.100	173	15,73	450	426	94,67	1.550	599	38,65	650	318	48,92
	· Kacang Hijau / *Green Peas*	100	—	—	50	—	—	150	—	—	100	—	—
	· Sorghum / *Sorghum*	—	—	—	350	—	—	350	—	—	—	—	—
	2. Inmas / *Inmas*	2.525	8.373	331,60	600	3.281	546,83	3.125	11.654	372,93	4.050	7.244	178,86
	· Jagung / *Maize*	425	880	207,06	400	1.853	463,25	825	2.733	331,27	950	1.204	126,74
	· Kacang tanah / *Pea nuts*	150	897	598,00	150	556	370,67	300	1.453	484,33	550	942	171,27
	· Kedele / *Soya beans*	1.850	6.417	348,86	50	838	1.676	1.900	7.255	381,84	2.400	4.898	204,08
	· Kacang Hijau / *Green peas*	100	179	179	—	34	—	100	213	213,00	150	200	133,33
	· Sorghum / *Sorghum*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.	Inmas Sayuran / *Vegetable Inmas*	2.900	2.231	76,93	2.550	2.826	110,82	5.450	5.057	92,79	3.525	2.928	83,06
	· Bawang merah / *Onion*	750	655	87,33	1.000	967	96,70	1.750	1.622	92,69	1.035	1.003	96,91
	· Bawang putih / *Garlic*	1.500	452	30,13	—	9	—	1.500	461	30,73	1.475	393	26,84
	· Petsai/sawi / *Edible bean/Chinese cabbage*	125	77	61,60	175	88	50,29	300	165	55,00	225	70	31,11
	· Lombok / *Paprika*	150	417	278	300	286	95,33	450	703	156,22	265	564	212,83
	· Kubis / *Cabbage*	175	277	158,29	425	303	71,29	600	580	96,67	300	165	55,00
	· Kentang / *Potato*	—	34	—	—	190		—	224		10	34	340,00
	· Tomat / *Tomato*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	86	17,20
	· Kacang panjang / *Long bean*	—	—	—	—	74	—	—	74	—	—	189	—
	· Sayuran dataran rendah / *Low land plain Vegetables*	200	286	143	750	909	189,85	950	1.195	125,80	210	424	201,92
Jml	III, IV, V	72.500	90.907	125,39	95.000	110.317	116,12	167.500	201.224	120,13	74.750	86.344	115,51

sebesar 110,82%. Kenaikan dalam musim tanam 1982 intensifikasi padi sebesar 116,65%, palawija 121% dan sayur-sayuran sebesar 83,16%.

Perkembangan Inmas terlihat jauh melebihi rencana dan sebaliknya Bimas masih belum mencapai sebagaimana yang diharapkan. Hal ini antara lain disebabkan :

a) prosedur mendapatkan pupuk Inmas lebih pendek dan mudah,
b) adanya tunggakan-tunggakan kredit sehingga menyulitkan untuk kredit Bimas masa berikutnya dan
c) adanya kelambatan-kelambatan pelayanan terhadap Bimas.

Sehubungan dengan adanya perkembangna atau keberhasilan intensifikasi, disamping faktor-faktor lainnya seperti sistem dan cara penyeluran pupuk, pestisida dan benih seringkali di atas rencana. Akan tetapi dalam tahun-tahun Pelita III sering terjadi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan adanya hama penyakit dan bencana alam. Lihat Tabel III-6.

Sebagai sarana penunjang agar peningkatan produksi dapat terus dipertahankan bahkan terus ditingkatkan, perlu adanya institusi-

Whereas the private big plantation has 6 kinds of plants, i.e. coconuts, coffee, cloves, vanilla, capoc and rubber.

The development of plantation in the region of Bali, in particular the non-traditional commodities like cloves, vanilla, virginia tobacco and cashew is increasing rapidly, taking into consideration its area surface and production. The development of the private big plantation however, cannot expand too much because of the limit of land surface they actually owned. The same case happened with the traditional commodities like coconuts and coffee since the commodities basic program in this case has only to do with rehabilitation and intensification of plants.

The development of plantation in Bali is a manifestation of the national development achievements in the agricultural sector, i.e. to increase the production and to increase the farmer's income. The policy of the plantation development in Bali is as follows :

a. In the fertile regions (West and Central Bali) where the condition of the farmers are relativily better than in other regions, plantation develop-

institusi. Sejak Pelita I hingga tahun ketiga Pelita III di seluruh Bali telah dibangun :

a) 3 (tiga) buah BBI (BBI Pegok, BBI Banyupoh dan BBI Luwus);
b) 27 (dua puluh tujuh) buah BPP,
c) 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) buah WKP dengan 15 orang PPS, 70 orang PPM dan 909 orang PPL.
   Tiap-tiap PPL membina 1 WKPP dan 1 orang PPL paling tidak membina 16 orang kontak tani, dimana 1 orang kontak tani diharapkan dapat mempengaruhi 5 orang petani pengikut,
d) 1(satu) buah BPT, yang kantornya masih di Kantor Dinas Pertanian Propinsi Dati I Bali.

ment is aimed to the rehabilition activities of coconut and coffee plantations, to the intensification of coconut and cloves plantation and the diversification of the efforts by means of the development of catch or cover crops like vanilla beneath coconut plantation.

b. In the economic and physically critical regions (South and East Bali) plantation commodities have been developed. These commodities have a double function, i.e. the economical function and at the same time the regreening horticulture like cashew, capoc, macademia nut and other plants.

Plantation development in the Repelita IV is in principle a follow-up of the earlier Pelita III in which the unexecuted targets have to be finished. Afterwards these achievements have to be developed, and the problems which

Tabel / ***Table III — 6***

KEADAAN HAMA/PENYAKIT DAN BENCANA ALAM
PEST/DISEASES AND NATURAL DISASTERS

Jenis Kerusakan *Kind of Destruction*	Tahun anggaran 1981/1982 / *Fiscal Year*														
	M.T. 1981					M.T. 1981/1982					M.T. 1982				
	Ringan *Light*	Sedang *Medium*	Berat *Heavy*	Puso *Extreem*	Jumlah *Total*	Ringan *Light*	Sedang *Medium*	Berat *Heavy*	Puso *Extreem*	Jumlah *Total*	Ringan *Light*	Sedang *Medium*	Berat *Heavy*	Puso *Extreem*	Jumlah
Hama/Penyakit *Pest/disease*															
- Wereng Batang Cokla *Brown Stalk Insect*	110,5	24	6	6,5	147	51,53	2,555	0,6	0,1	54,785	129,51	59	42,9	54	285,41
- Tikus / *Mouse*	1835,45	171,5	74,5	9	2090,45	832,5	25	10	–	867,50	671,13	8,5	2,5	–	682,13
- Penggerek Batang *Stalk Mover*	1365,5	226,5	10	–	1602	2137,75	168	4	–	2309,75	1493,6	98	4	–	1600,6
- Walang Sangit *Stink Beetle*	510,4	6	–	–	516,4	767,75	15	–	–	782,75	149	–	–	–	149
- Hama Putih *White Pest*	2028,95	44,5	3	–	2076,45	2539,8	155	25	–	2719,8	1012,13	26	–	–	1038,13
- Hama Putih Palsu *False White Insect*	375,09	2	–	–	377,09	521,09	22,5	–	–	544,45	419,7	31	1	–	451,7
- Banjar / *Banjar*	62	–	–	–	62	5,25	–	–	–	5,25	–	–	–	–	–
- Ulat Gravak *Grasak Worm*	928,5	737	20,5	–	1686	331	1	–	–	322	684,02	78	178	–	1040,02
- Trips Padi *Rice Trips*	28	–	–	–	28	67	–	–	–	67	–	–	–	–	–
- Kepinding Tanah *Land Budbug*	10	–	–	–	10	50	–	–	–	50	5	–	–	–	5
- Wereng Punggung Putih *White Back Insect*	11,25	2	–	–	13,25	2,125	–	–	–	2,125	885,435	4,65	20	–	910,085
- Lalat Padi *Riceflis*	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	271	–	–	–	271
- Tungro / *Tungro*	478,39	54,13	50,89	2,3	585,71	69,835	0,5	–	0,98	71,315	27,3	1	–	–	28,3
- Kerdil Hampa *Empty Dwarfs*	–	–	1,7	–	1,7	0,91	–	–		0,91	–	–	–	–	
- Rhizoetonia *Rhizoetonia*	252	68	–	–	320	163	10	–		173	202	34	–	–	236
- Helminthosporium *Helminthosporium*	8,05	–	–	–	8,05	104,55	14	–		118,55	6970,72	2279	1065,75	1000	11315,47

Dalam Repelita IV usaha-usaha peningkatan produksi bagi setiap komoditi pangan terus dipacu dan diarahkan sesuai dengan perkembangan keperluan. Sasaran produksi pangan disusun berdasarkan potensi lahan yang ada, dengan tetap mempertimbangkan segi kelestarian lingkungan agar produktivitas lahan dapat tetap dipertahankan secara berkesinambungan. Lihat Tabel III-7.

Bertitik tolak dari maksud tersebut, maka peningkatan produksi untuk komoditi padi semata-mata diusahakan melalui peningkatan rata-rata produksi per hektarnya, sedangkan arealnya akan mengalami penurunan guna dapat memberikan peluang bagi pengembangan komoditi palawija yang sekaligus dipakai sebagai tanaman selingan dalam menciptakan pola tanam yang baik.

may occur during the dynamic development have to be solved.
In the period of Repelita IV the basic policy of the horticultural subsector is as follows :

a Intensification with complete data input, rehabilitation of old plants with prime seed,
b Diversification of plants with other plants which have an economic higher value,
c Rehabilitation of fallow and bare regions with double functioned plants,
d Improvements of quality and marketing system of plantation products.

With those policy for the Repelita IV estimate of areal surface development and production can be seen in Table III - 10 and 11.

Tabel / *Table III — 7*

SASARAN PRODUKSI PANGAN SELAMA REPELITA IV (TON)
FOODSTUFF PRODUCTION DURING REPELITA IV (IN TONS)

No. Jenis Tanaman *Kind of Plant*	Akhir Pelita III (1983) *End of Pelita III*	1984	1985	1986	1987	1988	Kenaikan rata-rata/tahun (%) *Average Increase per year (%)*
1. Beras / *Rice*		599.021	620.867	642.535	664.151	685.596	
2. Jagung (pipilan kering) *Maize (dry corn)*		85.894	90.223	94.552	98.880	103.209	
3. Ubikayu (umbi kayu) *Cassava (wet)*		259.980	269.236	278.491	287.746	297.002	
4. Ubijalar (umbi basah) *Sweet Potato (wet)*		105.561	111.450	117.338	123.226	129.115	
5. Kacang Tanah (biji kering) *Peanut (dry)*		13.625	14.682	15.738	16.795	17.852	
6. Kedele (biji kering) *Soya Bean (dry)*		11.595	13.886	16.177	18.468	20.759	
7. Kacang hijau (biji kering) *Green Pea (dry)*		1.971	2.475	2.979	3.483	3.987	
8. Sayur-sayuran (segar) *(Fresh) Vegetable*		48.800	53.675	59.295	65.750	73.195	
9. Buah-buahan (segar) *(Fresh) Fruits*		270.000	284.770	300.350	316.775	334.100	

b. Perkebunan

Perkebunan merupakan sub sektor penting dalam perekonomian Propinsi Bali, dipandang dari segi pengusahaannya, perkebunan di Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan besar swasta (2%) dan selebihnya adalah perkebunan rakyat. Di daerah Bali terdapat 8 (delapan) jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, yakni : kelapa, kopi, panili, cengkeh, jambu mente, kapok, tembakau rakyat dan tembakau virginia. Lihat Tabel III-8 dan III-9.

Tabel / *Table III — 8*

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERKEBUNAN RAKYAT SELAMA PELITA III DI BALI (TON)
PLANTATION PRODUCTION DURING PELITA III IN BALI (IN TONS)

No.	Jenis tanaman *Kind of Plant*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1.	Kelapa/Kopra *Coconut/copra*	64.474	64.916	70.909	70.347	46.847	60.203,871
2.	Kopi *Coffee*	4.341	5.321	4.813	3.489	6.142	8.487,794
3.	Cengkeh *Cloves*	4	253	355	42	2.295,5	751,689
4.	Tembakau Virginia *V. Tobacco*	1.172	1.350	1.062	1.669	1.825,2	1.847,50
5.	Tembakau rakyat *People's Tobacco*	308	228	69	426	443,7	564,699
6.	Vanili *Vanilla*	0,80	38,90	145,10	46,10	439,7	362,029
7.	Jambu Mente *Cashew*	0,628	1,813	14,00	16,909	58,9	73,063
8.	Kapok *Capok*	82	89	67	43	27,0	48,725

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Bali.
Source : Plantation Office, the Province of Bali.

Sedangkan yang diusahakan oleh perkebunan besar swasta ada 6 (enam) jenis tanaman yang terdiri dari : kelapa, kopi, cengkeh, panili, kapok dan karet.

Tabel / *Table III — 9*

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERKEBUNAN SWASTA SELAMA PELITA III DI BALI (TON)
PRIVATE PLANTATION PRODUCTION DURING PELITA III IN BALI (IN TONS)

No.	Jenis Tanaman *Kind of Plant*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1.	Kelapa/Kopra *Coconut/copra*	845,197	810,726	668	836,40	671,257	1.311,59
2.	Kopi *Coffee*	39,015	74,553	50,20	53	11,46	610,90
3.	Cengkeh *Cloves*	0,066	5,899	4	2,4	8,206	19,94
4.	Panili *Vanilla*	10,52	17,13	17,01	123,245	23,59	35,20
5.	Kapok *Capoc*	176,618	184	180	125	92,57	200
6.	Karet *Rubber*	148,60	332,60	331,60	136	110,98	185,60

Sumber : Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Bali.
Source : Plantation Office, the Province of Bali

c. Forestry

Forest as rich natural resources for the living of human mankind has to be maintained and utilized for the welfare of the society.

So the development of the forestry sub-sector will be aimed to achieve maximum profit from the forest by means of intensifying wood production and other products and to maintain the potential of this natural resources. The natural resources of wood has to be maintained by efforts to safeguard the forest, to regreen the damaged forest and to converse natural wood into artificial forest for the supply of industrial wood.

The surface of forest in Bali is about 125,513 Ha or 22,19% of the whole surface of the Bali island. It is located in Central Bali from West to East and is the water and irrigation source of the whole island. This forest belongs to the tropical wet forest type and consists of mixed forest trees. 76% of it is located in the West part of the island and the remaining parts in Central

Perkembangan perkebunan di daerah Bali khususnya komoditi non tradisional seperti : cengkeh, panili, tembakau virginia dan jambu mente menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik ditinjau dari segi luas areal maupun dari segi produksinya. Namun perkembangan komoditi perkebunan besar swasta tidak diharapkan terlalu besar, karena terbatasnya tanah-tanah cadangan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada. Sedangkan komoditi tradisional seperti kelapa dan kopi perkembangan arealnya tidak begitu besar, karena program pokok komoditi ini adalah peremajaan dan intensifikasi tanaman.

Pembangunan perkebunan di daerah Bali adalah merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan nasional dalam sektor pertanian, yaitu meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan petani. Pembangunan perkebunan di Bali ditempuh melalui kebijaksanaan sebagai berikut :

a. Di daerah-daerah subur (Bali bagian barat dan tengah) dengan keadaan petani yang relatif lebih maju; pembangunan perkebunan diarahkan pada kegiatan peremajaan tanaman kelapa dan kopi, intensifikasi tanaman kelapa dan cengkeh serta diversifikasi usaha melalui pengembangan tanaman sela seperti panili di bawah tanaman kelapa,
b. Di daerah-daerah fisis dan ekonomis kritis (Bali bagian selatan dan timur) dikembangkan komoditi perkebunan yang mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan sekaligus sebagai tanaman penghijauan seperti tanaman; jambu mente, kapok, kemiri, dan lain sebagainya.

Pembangunan perkebunan dalam Repelita IV pada hakekatnya merupakan kelanjutan dan peningkatan segala usaha yang telah dilaksanakan dalam Pelita III, dimana sasaran yang belum tercapai harus dirampungkan. Kemudian hasil-hasil yang telah dicapai dikembangkan terus, sedangkan masalah yang baru timbul sebagai akibat dinamika pembangunan harus segera dipecahkan.
Adapun kebijaksanaan pokok dalam sub sektor Perkebunan selama Repelita IV adalah sebagai berikut :

a. intensifikasi melalui pemakaian input lengkap, peremajaan tanaman tua dengan menggunakan bibit unggul,
b. diversifikasi tanaman dengan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi,
c. rehabilitasi daerah-daerah tandus dan gundul dengan tanaman yang dapat berfungsi ganda,
d. perbaikan mutu dan sistem pemasaran hasil-hasil perkebunan.

Dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah selama Repelita IV diestimasikan perkembangan luas areal dan estimasi produksi Lihat Tabel III-10 dan III-11.

c. Kehutanan

Hutan sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat serba guna bagi kepentingan umat manusia, perlu dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara optimal dan lestari. Dengan demikian pembangunan di sub sektor Kehutanan diarahkan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnva dari hutan secara serba guna melalui kegiatan-kegiatan peningkatan produksi kayu dan hasil hutan lainnya serta menjaga kelestarian potensi sumber alamnya. Kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan kegiatan pembinaan hutan melalui usaha-usaha keamanan hutan, penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak serta konversi hutan alam menjadi hutan buatan yang menghasilkan kayu industri.

Luas hutan di Propinsi Bali adalah sekitar 125.513 Ha atau 22,19% dari luas wilayah pulau Bali. Hutan sebagai sumber penyimpanan air dan sumber pengairan terletak di tengah-tengah pulau Bali membentang di daerah pegunungan dari ujung barat sampai ujung timur pulau Bali, yang termasuk ke dalam tipe hutan tropika basah dengan vegetasi kayu rimba campuran.

Penyebaran hutan yang tidak merata dengan lokasi hutan sebagian besar pada kawasan Bali Barat (76%) sedangkan sisanya ada di bagian Bali Tengah dan Bali Timur. Keadaan topografi pada daerah hutan sebagian besar berbukit sampai bergunung, dan tanahnya mempunyai struktur rawan terhadap erosi. Melalui berbagai kegiatan selama Pelita III dari sub sektor Kehutanan, terlihat perkembangan luas areal dan produksi hasil hutan sebagai berikut. Lihat Tabel III-12.

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan luas areal hutan yang disebabkan adanya kegiatan perluasan kawasan hutan. Sedangkan luas areal hutan dalam fungsi lainnya tetap dari tahun ke tahun.

Pada tahun 1981/1982 diadakan beberapa Penelitian dan pengukuran ulang terhadap luas dan tata guna hutan, sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Pertanian tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan. Sehingga pada tanggal 10 November 1982 dengan SK Mentan No 821/

Tabel / *Table III — 10*

ESTIMASI LUAS AREAL KOMODITI PERKEBUNAN SELAMA REPELITA IV (Ha)
ESTIMATE OF PLANTATION COMMODITIES AREA SURFACE DURING REPELITA IV (Ha)

No.	Jenis Komoditi *Kind of Commodity*	Estimasi Luas Areal / *Estimation of Area Surface*				
		1984	1985	1986	1987	1988
1.	Kelapa / *Coconut*	81.880	82.160	82.440	82.720	83.000
2.	Kopi / *Coffee*	33.157	33.157	33.157	33.157	33.157
3.	Cengkeh / *Clove*	15.346	15.466	15.586	15.706	15.826
4.	Panili / *Vanilla*	2.053	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Jambu Mente / *Cashew*	17.400	18.360	19.800	24.000	27.000
6.	Kapok / *Capoc*	991	1.194	1.444	1.744	2.044
7.	Tembakau Rakyat *Population Tobacco*	380	420	465	510	620
8.	Tembakau Virginia *Virginia Tobacco*	1.500	2.000	2.500	3.000	4.000
9.	Karet / *Rubber*	332	332	332	332	332
	Jumlah / *Total*	153.042	155.789	160.924	163.869	168.679

Tabel / *Table III — 11*

ESTIMASI PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN DALAM REPELITA IV
ESTIMATE OF COMMODITIES PRODUCTION DURING REPELITA IV (TONS)

No.	Jenis Komoditi *Kind of Commodity*	Estimasi Produksi/*Estimation of Production*				
		1984	1985	1986	1987	1988
1.	Kelapa / *Coconut*	91.882	69.197	71.299	74.222	76.513
2.	Kopi / *Coffee*	5.628	7.143	7.805	8.601	9.544
3.	Cengkeh / *Cloves*	271	968	2.235	4.204	1.346
4.	Panili / *Vanilla*	331	473	608	694	713
5.	Jambu Mente / *Cashew*	42	56	84	110	150
6.	Kapok / *Capoc*	192	192	192	192	192
7.	Tembakau Rakyat *Population Tobacco*	190	210	233	255	310
8.	Tembakau Virginia *Virginia Tobacco*	2.250	3.000	3.750	4.500	6.000
9.	Karet / *Rubber*	138	138	138	138	138

and East Bali. The topographical condition in the forest is montainous and the land structure is very sensitive against erosion. The activities in development of the forest sub-sector during Pelita III is shown in Table III-12.

Tabel / *Table III — 12*

PERKEMBANGAN LUAS HUTAN DI PROPINSI BALI
THE DEVELOPMENT OF FOREST SURFACE IN THE PROVINCE OF BALI

Jenis Hutan *Kind of Forest*	1982 *(Ha)*	1983 *(Ha)*	1984 *(Ha)*
1. Hutan lindung / *Protected Forest*	84.059	84.150	84.409
2. Hutan Produksi / *Production Forest*	9.503	9.503	9.503
3. Hutan suaka alam/wisata *Wildlife preserved forest*	31.822	31.822	31.822
4. Kebun Raya / *Botanical Garden*	129	129	129
Jumlah / *Total*	125.513	125.613	125.863

The increase of forest area surface was caused by the activities in the expansion of the forest zone, whereas its function remained the same as in the earlier years.

In 1981/1982 some surveys and remeasuring of the surface included forest use had been done in fulfilment of the Isntruction of the Minister of Agriculture concerning the agreed forest management. The result was that on the 10th November 1982 with the Minister's decree SK Mentan No 821/Kpts/Um/11/1982 the 125,513 Ha forest area in the Province of Bali had been allocated as follows :

- *Wildlife preserved forest/Excursion Forest* = 31,821,80 Ha
- *Protected Forest* = 84,059,30 Ha
- *Limited-production Forest* = 5,650,44 Ha
- *Forest zone lend to the Botanical Garden* = 129,20 Ha
- *Mixed-production Forest* = 3,853,05 Ha

Till the end of 1984 the regreening of the critical and bare forest land in Bali had reached an area surface of 7,841 Ha with an additional forest zone of 350 Ha. To protect and to maintain scarce types of wood, intensification and regreening had been made with those kind of woods like : majegau, kuanitan, mundah, sawo kecik, cempaka and pandak.

Kpts/Um/11/1982 ditetapkan penunjukkan areal Hutan di wilayah Propinsi Dati I Bali seluas 125.513 Ha sebagai berikut :

- Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata = 31.821,80 Ha
- Hutan Lindung = 84.059,30 Ha
- Hutan Produksi Terbatas = 5.650,44 Ha
- Kawasan hutan yang dipinjamkan untuk Kb Raya = 129,20 Ha
- Hutan Produksi Tetap = 3.853,05 Ha

Sampai akhir tahun 1984 kehutanan di daerah Bali melalui penanaman kembali tanah-tanah kritis/hutan yang sudah gundul mencapai seluas 7.841 Ha dengan jenis kayu reboisasi dan penambahan areal hutan seluas 350 Ha. Disamping itu dalam rangka melestarikan jenis kayu yang mulai langka diadakan intensifikasi dan penanaman kembali jenis-jenis kayu seperti : majegau, kwanitan, mundeh, sawo kecik, cempaka dan pandak.

Produksi hasil hutan berupa kayu pertukangan/bangunan terus menurun, sedangkan produksi hasil hutan dari jenis lain terutama gondorukem dan minyak kayu putih secara bertahap dikembangkan sesuai dengan perkembangan penanaman kayu-kayu yang menghasilkan produksi tersebut. Perkembangan produksi hasil hutan di Propinsi Bali (1980-1982). Lihat Tabel III-13.

Pembangunan kehutanan Bali selama Repelita IV terutama ditujukan kepada usaha konservasi (perlindungan dan pelestarian) alam disamping fungsi produksi dan fungsi sosial. Dengan demikian secara garis besar kebijaksanaan pembangunan sub sektor Kehutanan dalam Repelita IV diarahkan agar hutan dapat memenuhi fungsi sebagai pelestarian dan perlindungan alam, yaitu pada fungsi-fungsi hidrologis, perlindungan flora dan fauna, termasuk pelestarian plasma nuftah. Meskipun dalam skala yang relatif kecil, hutan di Bali diharapkan juga produktif, baik kayu dan non kayu terutama untuk menunjang industri kerajinan/industri kecil lainnya. Kemudian dalam menghadapi kepadatan penduduk di Propinsi Bali, maka hutan di Bali harus bisa mempunyai fungsi sosial yang dapat ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan.

d. Peternakan

Usaha peternakan di Propinsi Bali sebagian besar masih bersifat tradisional (dengan memanfaatkan limbah pertanian) dimana penggunaan teknologi modern masih sangat terbatas, disamping permodalan dalam bidang peternakan relatif masih sangat kecil, oleh karenanya produktivitas dari usaha peternakan ini masih jauh di bawah titik optimal. Demikian juga bagi konsumsi protein hewan asal ternak relatif masih rendah. Perkembangan peternakan di daerah Bali masih dirasakan belum begitu pesat karena kurangnya pengetahuan/keterampilan, lemahnya modal, tidak stabilnya harga produksi dan bibit ternak.

Seirama dengan perubahan-perubahan besar dalam penanganan masalah-masalah ekonomi yang dilaksanakan, dapat diperkirakan bahwa permintaan efektif akan daging, telur dan susu pada masa-masa mendatang akan terus meningkat. Hal ini disebabkan karena membaiknya keadaan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya daya beli masyarakat, juga berkembangnya tingkat kesadaran masyarakat Bali akan gizi. Mengingat hal tersebut, pembangunan peternakan diarahkan pada tercapainya peningkatan populasi, produktivitas dan kualitas ternak yang sekaligus dapat pula meningkatkan pendapatan petani peternak serta meningkatkan kesempatan kerja. Pembangunan usaha-usaha peternakan diarahkan agar dapat melepaskan diri dari cara-cara tradisional. Dan pengembangan usaha-usaha peternakan harus bersifat menyeluruh, yang meliputi penggunaan bibit ternak unggul, perbaikan mutu makanan ternak, perbaikan sistem pengelolaan pencegahan/pemberantasan penyakit, pengadaan sarana/prasarana usaha peternakan serta perbaikan pemasarannya.

Secara keseluruhan perkembangan peternakan di Bali dirasakan relatif masih rendah bila dibandingkan dengan kemajuan teknologi dan manajemen peternakan. Namun perkembangan ayam ras menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Perkembangan populasi ternak selama tahun-tahun Pelita III menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Populasi sapi naik 3,91% per tahun;
b. Populasi kerbau menurun 4,44% per tahun;
c. Populasi babi meningkat 10,36 per tahun;
d. Populasi kambing/domba meningkat 15,32% per tahun;
e. Populasi ayam bukan ras meningkat 9,67% per tahun;
f. Populasi ayam ras meningkat 29,32% per tahun;
g. Populasi itik meningkat 18,06% per tahun;
h. Populasi kuda menurun 6,81% per tahun. Lihat Tabel III-14.

Pemeliharaan sapi di Bali masih bersifat tradisional semi intensif komersial. Dalam hal ini pemeliharaan sudah dikandang dan sebagian masih digembalakan. Tujuan pemeliharaan sapi masih dititik beratkan pada pemanfaatan tenaga kerjanya untuk mengolah lahan pertanian, disamping tujuan-tujuan lainnya, antara lain berfungsi sebagai sumber

Forest products like the types of wood for the handicraft and construction decreased continuously, whereas other products in particular gum resin and cajaput oil had increased as a result of the expansion of the regreening with scarce types of wood. The increase of forest products in the Province of Bali (1980-1982) can be observed in Table III -13.

Tabel / *Table III — 13*

PERKEMBANGAN PRODUKSI HASIL HUTAN DI PROPINSI BALI TAHUN 1980 SAMPAI DENGAN TAHUN 1982
DEVELOPMENT OF FOREST PRODUCTS IN THE PROVINCE OF BALI FROM 1980 UNTIL 1982

Jenis hasil hutan / ***Type of forest product***	**1980**	**1981**	**1982**
1. Kayu perpatungan (M3) *Wood for handicraft*	816,22	169,01	69,173
2. Jati gelondongan *Teak wood logs*	96,05	—	—
3. Kayu bakar (Sm) *Fire wood (Sm)*	5,990	2.123	7.512
4. Arang kayu (ton) *Charcoal (tons)*	38,20	—	—
5. Getah pinus (ton) *Pinus sup (tons)*	38,2	39,2	41,3
6. Gondorukem (ton) *Colophonium resin*	19.312	22.570	25,780
7. Minyak kayu putih (liter) *Cajaput or L Melaleuca leucadendron Oil (liter)*	1.479	4.670	4.085,10
8. Terpentin (liter) *Turpentine (liter)*	935	170	350
9. Pohon natal (Mt) *Christmas tree (Mt)*	156	70	105

During Repelita IV the forest development in Bali mainly has the aim to intensify conservation efforts (protection and maintaining) of the natural environs beside the production and social function. So in broad terms the policy of the forestry subsector development in Repelita IV is aimed to fulfill the function of the forest in maintaining and protecting the natural environs, i.e. the hydrological functions, the flora and fauna protection, including the protection of ***plasma nuftah.***

Although in a relatively small scale, the forest in Bali is expected to be more productive in wood and non-wood products to support in particular the handicraft and other small industries. Besides, the forest must have a social function in the crowded populated island of Bali to increase the welfare of the society, in particular those who live in the forest circumference.

d. Animal Husbandry

A big part of the Animal Husbandry in Bali still has a traditional character (by utilizing agricultural dump) in which the use of modern technology is still limited besides the relative small investments in the field an animal husbandry. This is the reason why the productivity of animal husbandry is far below its optimum point. The consumption of animal's protein from breeding is also relatively low. The animal husbandry in Bali is still unsatisfactory because of the low skill and knowledge of the farmers, the weak capital, the unstability of the product and animal seedling prices.

In line with the big changes in the economic policy it has been estimated that the effective demand of meat, eggs and milk will continuously increase in the future. This is because of the better economical situation with result in the purchasing power of the society, and also because of the consciousness level of the Balinese population to get nutrition. Taking the above mentioned events into consideration, the husbandry has been aimed to achieve an increase in animal population, productivity and quality and at the same time to increase the income of the breeders and to increase employment opportunities. Efforts have been made to leave the traditional breeding system behind. The expansion of business in husbandry must include the utilization of prime seedling, the rehabilitation of animal food quality, the rehabilitation of the management system in preventing and liquidating of diseases, the creation of husbandry business facilities and intensifying of its marketing.

In general the husbandry development in Bali is relatively still slow compared with the progress of technology and husbandry management. But on the other hand the expansion of pedigree poultry has made good progress. The expansion of husbandry population in the period of Pelita III was as follows :

a. the population of cows increased with 3,91% per year,
b. the population of buffaloes decreased with 4,44% per year,
c. the population of pigs increased with 10,36% per year,
d. the population of goats/sheep increased with 15,32% per year,
e. the population of poultry increased with 9,67% per year,
f. the population of pedigree poultry increased with 29,32% per year,

pupuk organis. Peningkatanl mutu dan jumlah ternak sapi di Bali dilaksanakan melalui penyebaran pejantan, kawin suntik dan lebih mengintensifkan pemberantasan penyakit hewan disamping usaha-usaha peningkatan mutu dan jumlah penyediaan makanan ternak.

Pemeliharaan sapi perah di Bali sangat terbatas dan tidak banyak dapat dikembangkan karena penunjukkan daerah Bali sebagai daerah pemurnian sapi Bali. Pemeliharaannya sampai saat ini terbatas pada perusahaan persusuan untuk mencukupi susu murni segar bagi para konsumen di daerah perkotaan. Sampai tahun 1982 di daerah Bali terdapat 4 perusahaan sapi perah dengan jumlah sapinya sebanyak 141 ekor dan produksinya mencapai 100,85 ton.

Kuda merupakan ternak yang kian lama kian menurun populasinya, karena pemeliharaannya tidak ekonomis dan pemanfaatannya sudah sangat terdesak oleh sarana transportasi kendaraan bermotor. Penggunaan kuda hanya terbatas pada daerah perkotaan untuk menarik dokar, sedangkan untuk menarik beban penggunaannya sangat terbatas.

Kerbau dipelihara sebagai halnya ternak sapi, hanya pada kerbau populasinya tidak merata di setiap daerah. Kerbau banyak dipelihara di wilayah Bali bagian barat yaitu di Kabupaten Jembrana, Buleleng dan Tabanan. Pada umumnya pemeliharaannya pada daerah yang bersungai dan berawa-rawa. Laju perkembangan ternak kerbau dirasakan sangat lambat, bahkan dalam akhir Pelita III terjadi penurunan sekitar 3,32%. Hal ini disebabkan karena lambatnya reproduksi dibandingkan dengan jumlah pemotongan disamping faktor penyakit. Salah satu untuk mempercepat pertambahan populasi kerbau telah diusahakan penyebaran bibit ternak kerbau.

Pemeliharaan babi di Bali sebagian besar merupakan peternakan rakyat yang usahanya masih bersifat tradisional atau sampingan dengan pemberian makanan berupa makanan sisa dari limbah dapur dan limbah pertanian. Hanya sebagian kecil sudah diusahakan sebagai usaha komersial, sedangkan produksinya sebagian besar untuk pemasaran lokal dan diantar pulaukan. Komoditi ekspor hingga saat ini belum memungkinkan rendahnya mutu daging babi. Untuk meningkatkan mutu daging babi diadakan perkawinan silang (crosing) dengan babi sadle back.

Ternak kambing/domba sedikit menunjukkan perkembangan, mungkin karena melimpahnya hijauan makanan ternak lamtoro pada perkebunan rakyat, terutama dalam perkebunan panili, disamping pemasaran ternak kambing dirasakan baik. Perkembangan ternak ini sebagian besar diarahkan untuk konsumsi lokal dan melihat keperluan akan kambing dibandingkan dengan jumlah populasinya terasa kurang seimbang.

Perkembangan ayam ras dari tahun ke tahun laju pertumbuhannya relatif pesat sekali. Hal ini disebabkan karena dipengaruhi perkembangan wisatawan yang datang ke Bali. Sedangkan ayam bukan ras merupakan modal potensial bagi petani di daerah ini, karena pemeliharannya masih merupakan kerja sambilan. Ayam bukan ras inipun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena adanya kesadaran masyarakat akan arti ekonomis daripada pemeliharaan ayam, yang ditunjang oleh berbagai usaha perbaikan mutu dan produktivitasnya maupun pencegahan penyakit serta penyuluhan-penyuluhan.

Usaha peternakan itik sebagian besar juga masih diusahakan secara tradisional dengan menggembalakannya di persawahan, disamping juga dengan memberikan makanan gabah atau jagung. Jenis itik yang ada di daerah Bali ada 4 macam yakni : Itik Bali, Alabio, Itik Manila dan Khaki Campbel. Perkembangan ternak ini disamping keperluan akan telur semakin meningkat, demikian pula pemasarannya ke luar Bali. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu selama Pelita III (lihat Tabel III-15).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan peternakan hingga tujuannya tercapai secara optimal, maka dalam masa Repelita IV diadakan berbagai penyempurnaan kebijaksanaan antara lain kebijaksanaan teknis dan kebijaksanan ekonomi. Sedang langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengadakan pembinaan sarana produksi, keterampilan peternak, pengamanan dan lalu lintas ternak.

c. *Perikanan*

Bali yang dilingkari dengan lautan, Perikanan merupakan sub sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan masyarakat. Sejak Pelita I hingga Pelita III potensi perikanan relatif belum dimanfaatkan sepenuhnya karena kurangnya keterampilan, harga pemasaran hasil-hasil ikan yang belum diterima secara wajar oleh nelayan dan juga masih belum lengkapnya sarana/prasarana untuk menunjang kegiatan peternakan ikan. Kemudian Pelita demi Pelita hingga Pelita III melalui penyuluhan-penyuluhan, bantuan peralatan dan permodalan, motorisasi serta pembangunan

g. the population of ducks increased with 18,06% per year,
h. the population of horses decreased with 6,81% per year (See Table III-14).

Tabel / ***Table III — 14***

PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK
SELAMA PELITA III PROPINSI BALI
DEVELOPMENT OF HUSBANDRY POPULATION DURING PELITA III IN THE PROVINCE BALI

Jenis Ternak *Kind of Animal*	**1979**	**1980**	**1981**	**1982**	**1983**	**1984**
1. Sapi / *Cow*	341.722	367.911	389.015	406.129	406.129	413.830
2. Sapi perah / *Diary Cow*	168	159	153	141	138	129
3. Kerbau / *Buffalo*	7.233	7.395	7.349	7.544	7.199	7.817
4. Babi / *Pig*	575.781	651.899	789.960	711.803	661.598	689.491
5. Kambing & Domba *Goat and Sheep*	22.999	28.051	30.353	31.789	46.477	61.773
6. Kuda / *Horse*	2.877	2.324	2.223	2.142	1.818	1.956
7. Ayam ras/*Pedigree poultry*	443.244	783.599	1.078.990	958.614	916.767	1.007.541
8. Ayam bukan ras / *Poultry*	2.375.882	2.667.733	3.318.206	3.457.479	3.161.375	3.250.633
9. Itik / *Duck*	547.501	522.703	702.469	658.034	557.949	655.322

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Dati I Bali.
Source : Animal Husbandry Office, the Province of Bali

Cattle breeding in Bali still has a semi-intensive commercial traditional character. In this case the cows are put in the stables and outside. The aim of cattle breeding is stressed on the utilizing of the animal's working power in the agricultural field and other purposes like the animal's function as a source of original fertilizer. The increase of cattle in Bali has been done by means of breeding bull distribution, artifical insemination and intensifying the killing of animal pests beside the efforts to increase the quality and the amount of animal food stock.

Diary cows husbandry in Bali is very limited and cannot be expanded because of the assigment of Bali as a pure cattle zone. Up till now diary cows are breeded only by milk enterpreneurs to supply the necessary fresh pure milk to their consumers in the cities. Up till 1982 there were 4 diary cow breeders in Bali with an amount of 141 animals and a production of 100,05 tons of milk.

The amount of horses decreased by the years because of the high cost of breeding and because those horses were pushed aside by the motor vehicle transportation facilities. The utilizing of these animals is only to pull dogcart in the urban area, whereas the use as a packhorse is very limited.

The breeding of buffaloes is the same as that of cow husbandry, but the amount of buffaloes in the regions are not equal. Most of them are breeded in the West part of Bali i.e. in the districts of Jembrana, Buleleng and Tabanan, generally in the river and swamp zones. The development of buffalo breeding is very slow. At the end of Pelita III there had been a decrease of about 3,23%. This was caused by the low rate of birth in comparison with the big amount of slaughterings beside pest factors. An effort to intensify the population of buffaloes had been made by means of the distribution of buffalo breedlings.

The Pig husbandry in Bali is mainly done by the population on a traditional way or as a subsidiary business and feeding the animals with food rest from the kitchen and agricultural cesspools. Only a small part has been established as a commercial company which sells a big part of its product in the local and inter-insular markets. Up till now the export commodities of pig meat are still useless because of its low quality. Efforts has been made to increase this quality by crossing those pig with saddle back pigs.

The development of goat and sheep husbandry has just begin to make progress. May be because of the surplus of cattle food, i.e. the lamtoro (Parkia Speciosa Hassk), a kind of tree wind edible seed pods, which can be found in the house garden of the population and especially in the vanilla plantations; or may be because of its good marketing. A big part of this animal husbandry has been aimed for the local consumption but it seems that the requirements for goats and sheep are still not in balance with the population of those animals.

The development of pedigree poultry increases every year as a result of the increase of tourism in Bali. For the farmers in this region poultry is a potential investment since its breeding is still a subsidiary business. This kind of poultry has made progress too because of the awareness of the society of its economic value and because of their efforts to develop the quality and productivity as well as the prevention of disease and also because of the guidelines in its management.

A big part of the duck poultry business is still managed with the traditional system, i.e. to tend the ducks in the fields beside to feed them with gabah (rice in husk after threshing and maize. There are 4 kinds of ducks in Bali i.e. the Balinese duck, the Alabio, the Manila duck and the Khaki Campbel. This poultry has developed to fulfill the increasing needs for eggs and for marketing outside the island of Bali. For a better view about the development of meat, eggs and milk product during Pelita III, see Table III-15.

Tabel / *Table III — 15*

PERKEMBANGAN PRODUKSI DAGING TELUR DAN SUSU SELAMA PELITA III PROPINSI BALI
DEVELOPMENT OF MEAT, EGGS AND MILK PRODUCTS DURING PELITA III IN THE PROVINCE OF BALI (IN TOWNS)

(satuan ton)

Uraian / *Description*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1. Daging / Meat	1.927,96	21.704,37	23.891,13	25.466,34	26.220,61	28.482,22
2. Telur / Egg	5.811,70	2.629,63	9.996,14	12.113,75	9.428,19	14.293,77
3. Susu / Milk	117,34	69,57	108,70	100,85	96,54	106,11

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Source : Animal Husbandry Office, the Province of Bali

sarana/prasarana sudah nampak adanya peningkatan baik produksi perikanan maupun penghasilan kaum nelayannya.

Luas perairan laut daerah Bali diperkirakan 9.500 Km² dengan potensi perikanan sebesar 77.985 ton per tahun. Potensi sumber perikanan ini belum termasuk perairan laut bagian selatan Bali yang pemanfaatannya hingga tahun 1983 baru 65,31%.

Perairan Bali bagian utara meliputi wilayah Kabupaten Buleleng, yang luas perairannya diperkirakan 3.168 Km² memiliki potensi ± 3.412,8 ton/tahun dengan pemanfaatannya baru mencapai 44,07%. Jenis ikan yang banyak tertangkap adalah ikan : tongkol, tuna, cakalang, tenggiri, cucut, kakap, kerapu, lencam, ikan hias dan lain sebagainya.

Perairan Bali bagian barat meliputi wilayah Kabupaten Badung, Tabanan dan Jembrana dengan luas perairan sekitar 2.982 Km² dengan potensi ikannya diperkirakan ± 68.886,2 ton/tahun. Pemanfaatannya baru mencapai 63,65% yang terdiri atas jenis ikan : lemuru, tongkol, tuna, cekalang, layang, selar, ikan terbang, cucut, kakap, kerapu, lencam, lautisi, gerot-gerot, udang barong (lobster) dan sebagainya. Di perairan ini potensi ikan lemuru sangat tinggi, terutama di perairan Selat Bali.

Perairan Bali bagian timur meliputi wilayah Kabupaten Karangasem, Klungkung, Gianyar, dan perairan di Selat Lombok yang luasnya diperkirakan 3.350 Km² memiliki potensi ± 5.686 ton/tahun dan pemanfaatannya baru mencapai 98,24%. Jenis-jenis ikan yang banyak tertangkap di perairan ini adalah : tongkol, tuna, cakalang, tenggiri, cucut, kakap, kerapu, lencam, ikan hias dan sebagainya.

Perairan umum yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan diperkirakan ± 5.000 Ha dengan potensi kurang lebih 750 ton/tahun dan pemanfaatannya baru mencapai 95,36%. Sedangkan lahan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan terdiri atas : sawah, kolam dan tambak yang luasnya masing-masing 40.000 Ha, 115 ha dan 1.330 Ha. Dan pemanfaatannya hingga akhir Pelita III baru mencapai : sawah - 3.671 Ha (9,18%), kolam - 99 Ha (86%) dan tambak - 304 Ha (23,38%).

Sedangkan usaha-usaha budidaya di perairan pantai dimana potensi pantai ± 4.000 Ha baru mencapai 0,15% (±. 5 Ha) dengan rumput laut (eucheuma spinocum). Produksi rumput-rumput laut tersebut rata-rata sebesar 50 ton rumput laut kering per hektar/tahun (50 ton/ha/th).

Adapun perkembangan produksi perikanan daerah Bali selama Pelita III dapat dilihat pada Tabel III-16.

Peningkatan produksi tersebut terutama terjadi pada hasil tangkapan di laut yakni 97,55% dari total produksi tahun 1982. Dari hasil penangkapan ikan di laut ini, komposisinya terdiri dari : Lemuru 70,3%, Tuna/cakalang 11,0%, Tongkol 11,2%, Cucut/hiu 1,0% dan lainlainnya 6,5%.

Penurunan produksi budidaya ikan terutama terjadi pada budidaya ikan di sawah/mina padi yang luas arealnya setiap tahun berkurang, disamping penyediaan benih ikan yang belum memadai. Namun demikian produksi budidaya kolam dan tambak menunjukkan adanya peningkatan selama empat tahun pertama Pelita III, yang disebutkan semakin berkembangnya pelaksanaan intensifikasi budidaya kolam dan tambak serta ekstensifikasi tambak.

Budidaya ikan di kolam air deras mulai dicoba pada bulan Juni 1983 di Kabupaten Tabanan dan sampai saat ini jumlah kolam air deras sudah berkembang menjadi 10 buah/unit dengan ukuran 40-50 M2 dan 3 diantaranya adalah merupakan unit kolam percontohan yang dibiayai dari dana APBD. Produksi yang dicapai rata-rata 2,5 ton/unit/tahun dengan jumlah penebaran 300 - 400 Kg per unit.

Penyediaan bahan makanan dari hasil perikanan sebagai salah satu sumber protein hewani dalam rangka peningkatan gizi masyarakat pada

To overcome the problems of the husbandry and poultry development until the optimum, achievements have been reached to some perfection in the policy of Repelita IV, among other things the technical and economic aspects will be executed. And for this guidelines in the product facilities, the skill of the farmers, the security and transportation of the animals will be given.

e. Fishery

In Bali with its waters, fishery is a potential sub-sector to be developed in the frame work of increasing the income of the society. Since Pelita I until Pelita III the fishery potential had not yet fully been utilized because of the low skill of the fishermen, the marketing price of this products which was still unacceptable to the fishermen and also because of the incompleteness of facilities/preparations to support the activities of fish-catch. But in those years there was an increase of fishery products and income of the fishermen. This was the results of the given guideliness, fishery accessories and capital, motorization and the development of facilities.

The surface of the waters surrounding Bali is about 9,500 Km² with a potential of fishery of 77,985 tons per year. This potential source did not include the sea in South of the island which until 1983 only 65,31% had been exploited.

The Balinese waters North of the island includes the district zone of Buleleng has a surface of approximitally 3,168 Km² with a potential of ± 3,412.8 tons/year had only achieved 44,07%. Most of the kinds of catched fish are : tongkol (mackerel), tunny, tengiri (spanish mackerel), cakalang (skipjack), cucut (shark), kakap (giant perch) kerapu (grouper), lencam (sea bream), decoration fishes and others.

The waters in West Bali includes the district zones of Badung, Tabanan and Jembrana with a surface of about 2,982 Km². Its fish potential is about 68,886,2 tons/year. Only 63,65% had been utilized consisting of : a kind of sardines (lemuru), mackerel, tunny, skipjack, layang (seafish resembling the herring), selar (caranx), ikan terbang (flying fish), shark, giant perch, grouper, sea beam, lautisi, gerot-gerot (the grunter, Pristipoma hasta), lobster (udang barong) and so on. In this waters, in particular the Bali Straits, the sardine fish potential is very high.

The waters in the East of Bali includes the district zones of Karangasem, Klungkung, Gianyar and the Lombok Straits have a surface of approximately 3,350 Km² with a potential of ± 5,686 tons/year, which had been utilized 98,24% only. The kind of fish in this waters are mackerel, tunny, skipjack, spanish mackerel, shark, giant perch, grouper, sea beam, decoration fishes and so on.

The rivers which can be utilized for fishery is about 5,000 Ha with a potential of approximately 750 tons/year, which had been utilized 95,36% only. Whereas the potential area which can be used for the cultivation consists of 40,000 Ha rice fields, 115 Ha fishponds and 1,330 Ha dams. Its utilization until the end of Pelita III was 3,671 Ha for rice fields (9,18%), 99 Ha for fishponds (86%) and 304 Ha for dams (23,38%).

Whereas the efforts to establish cultivation of rumput laut/sea weed (eucheuma spinocum) along the coast with a surface of ± 4,000 Ha had reached 0,15% (± 5 Ha) only. The production of this commodity is about 50 tons per hectare/year.

The development of fishery production can be observed in Table III — 16.

The increase of the production particularly happened in the sea fish catch in 1982 in which it achieved 97,55% of the total production. The specification of the catched fishes was as follows : sardines 70,3%, tunny/skipjack 11,0%, mackerel 11,2%, shark/big sea fish 1,0% and other fishes 6,5%.

The fish culture decreased as a result of its cultivation in the rice fields which yearly became smaller and smaller beside the shortcoming of fish breedlings. The cultivation production from fish pond and dam nevertheless had increased during the first four years of Pelita III because of the development of both cultivation intensification and the execution of dam extensification.

The cultivation of fish in fishponds with fast streaming water was tried out in July 1983 in the District of Tabanan. Nowadays this kind of fishpond has developed to 10 units of 40 - 50 M² water surface, from which 3 units are sample fishponds and financed with the APBD budget. The total fish production is about 2,5 tons/Unit/year and its breedling 300 - 400 Kg per unit.

The foodstock from fish products as one of the animal protein source in the framework of the increase of nutrition for the society had reach 14 Kg/capita/year only in 1982. During four years in the Pelita III the fish consumption per capita had an average increase of 13,01% per year. This increase if compared with the optimum nutrition need of 18,5 Kg/capita/year is only 75,67%.

The export for foreign marketing of fish production from Bali consists of : tunny/skipjack to Singapore, Japan and Italy; decoration fishes to Singapore, West Germany, the Netherlands and Australia. Rumput Laut (Eucheuma spinocum) or sea weed is exported to Denmark and Japan. Conserved fish is exported to England, the Netherlands, West Germany and Belgium.

Tabel / *Table III — 16*

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DAERAH BALI SELAMA PELITA III (DALAM SATUAN TON)
DEVELOPMENT OF FISHERY PRODUCTION IN THE PROVINCE OF BALI DURING PELITA III (IN TONS)

Sub Sektor	1979	1980	1981	1982	1983	1984
A. Perikanan Laut *Sea Fishery*	26.437	21.980	24.863	41.039	51.304,4	58.437,56
1. Penangkapan *Fish catch*	26.395	21.899	24.677	40.985	50.934,4	56.901,56
2. Budidaya *Cultivation*	42	81	186	54	370,0	1.536,0
B. Perikanan darat *Land Fishery*	930	887	943	977	1.132,3	1.214,7
1. Penangkapan di perairan umum *Fish catch in fresh water, river dam etc.*	497	454	530	573	715,2	542,8
2. Budidaya *Cultivation*	433	433	413	402	417,1	671,9
- di Tambak *in dam*	42	42	59	64	66,6	82,6
- di Kolam *in fish pond*	56	50	67	66	110,4	179,9
- di Sawah *in rice field*	335	341	287	272	240,1	409,4

Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Source : Fishery Office, the Province of Bali

tahun 1982 baru mencapai 14 Kg/kapita/tahun. Selama empat tahun Pelita III konsumsi ikan per kapita menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 13,01% per tahun. Tingkat konsumsi per kapita yang telah dicapai ini apabila dibandingkan dengan keperluan gizi optimal sebanyak 18,5 Kg/kapita/tahun baru mencapai 75,67%.

Untuk pemasaran luar negeri produksi ikan dari Bali selama ini di ekspor ke Singapura, Jepang dan Italia untuk ikan tuna/cakalang; ikan hias negara tujuannya Singapura, Jerman Barat, Belanda dan Australia; rumput laut diekspor ke Denmark dan Jepang; ikan kaleng diekspor ke Inggris, Belanda, Jerman Barat dan Belgia.

Dalam periode Repelita IV, sejalan dengan tujuan pembangunan perikanan maka produksi perikanan daerah Bali diproyeksikan dengan peningkatan rata-rata 17,5% per tahun, yaitu dari 31.570 ton menjadi 60.200 ton (1984-1988).

Konsumsi total ikan selama Repelita V diproyeksikan dengan peningkatan rata-rata 11,5% per tahun, sedangkan konsumsi ikan per kapita diproyeksikan dengan peningkatan rata-rata 9,9% per tahun yaitu dari 12,35 Kg menjadi 18,04 Kg (1984-1988). Lihat Tabel III-17.

f. I r i g a s i

Pembangunan pengairan meliputi segala kegiatan dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber air dengan hasilguna dan dayaguna yang setinggi-tingginya terutama untuk menunjang pembangunan sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produksi pangan serta produksi pertanian lainnya. Pembangunan pertanian menunjang usaha peningkatan produksi pangan adalah melalui penyediaan air irigasi dan pembangunan daerah. Selanjutnya pembangunan pengairan juga dimaksudkan untuk mengamankan daerah pemukiman dan produksi pangan dari bencana banjir dan untuk menunjang pembangunan industri serta memperkecil masalah pengangguran.

Pulau Bali dengan areal persawahan yang sangat terbatas (100.429,50 Ha) dan penduduk yang relatif tinggi (± 438 jiwa/km²), maka pembangunan pengairan ditangani secara seksama dan berhati-hati agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Luas sawah berpengairan setengah teknis di Bali seluruhnya ada seluas 59.523,50 Ha. Pengairan sederhana non PU 30.398 Ha dan luas sawah tadah hujan 765 Ha, pengairan sederhana PU 9.743 Ha. Sampai dengan tahun terakhir Pelita III hasil-hasil yang dicapai dalam bidang pengairan/irigasi ini adalah sebagai berikut :

a. program eksploitasi dan pemeliharaan pengairan seluas 284.024 Ha,
b. program perbaikan dan peningkatan irigasi seluas 22.252 Ha,
c. program pembangunan jaringan irigasi baru terdiri dari jaringan utama 19.040 Ha jaringan tersier 39.743 Ha dan jaringan air tanah 100 Ha,
d. program peningkatan hutan, tanah dan air dengan hasil :
   - perbaikan-perbaikan pengaman sungai (40,05 Ha),
   - pengamanan wilayah daerah produksi dan pemukiman (8.865 Ha),

In the period of Repelita IV in line with the aim of the fishery development, the fishery production will be projected to an average increase of 17,5% per year, i.e. from 31,570 tons to 60,200 tons (1984-1988).

The total consumption of fish during Repelita IV will be projected to an average increase of 11,5% per year, whereas the fish consumption per capita will be projected to an average increase of 9,9% per year, i.e. from 12,35 Kg to 18,04 Kg (1984-1988). See Table III-17.

Tabel / *Table III — 17*

PROYEKSI KONSUMSI TOTAL KONSUMSI PER KAPITA DAN PENDUDUK DAERAH BALI DALAM REPELITA IV
TOTAL CONSUMPTION, PER CAPITA AND POPULATION IN THE PROVINCE OF BALI IN REPELITA IV

Tahun *Year*	Konsumsi Total (Ton) *Total consumption*	Konsumsi/ Kapita (Kg) *Consumption/ capita*	Penduduk (1.000 Org) *Population (1.000 persons)*
1984	32.271	12.35	2.615
1985	38.078	14.36	2.652
1986	40.662	15.11	2.691
1987	46.065	16.88	2.728
1988	49.863	18.04	2.765
Rata-rata/Tahun *Average/Year (%)*	11,5	9,9	1,4

f. Irrigation

The development of irrigation includes all kind of activities and the policy to increase and expand the water resources with maximum effectivity and efficiency, in particular to support the agricultural sector of development especially in the increase of foodstuff production and other agricultural products. The development of agriculture support the efforts to intensify the foodstuff production by utilizing the irrigation water supply and to increase the regional development. Besides, the irrigation development is also aimed to safeguard the population settlements and the foodstuff production from flood afflictions and to support the industrial development and to minimize the unemployment problems.

The irrigation development has to be handled with care for the welfare of the society, since Bali has a total ricefield area of only 100,429,50 Ha with a population of ± 438 persons/Km².

The total semi-irrigated ricefields surface in Bali is 59,523,50 Ha. While, 30,398 Ha ricefields get water supply from a Non-PU (non governmental public works) simple irrigation system, 9,743 Ha get primitive irrigation from the PU and 765 Ha depends on the rainfall.

Up till the final year of Pelita III the achievements which had been reached in the field of water-supply/irrigation were as follows :

a. The maintainance and exploitation program of irrigation was 284,024 Ha,
b. Rehabilitation and intensifying programme of irrigation was 252 Ha,
c. Irrigation network development just consisted of 19,040 Ha main network and 39,743 Ha tertiary network.
d. The programme of increasing forest, land and water supply which resulted in :
   - the rehabilitation of river protection (40,05 Ha)
   - the protection of production and settlement zones (8,865 Ha),
e. The research programme of agriculture and irrigation which resulted in :
   - P3 SA (ricefields agriculture and irrigation programme),
   - the study of water supply reposition in North and West Bali,
   - the study of vegetable reposition in the District of Bedugul,
   - the study of Rawa Perancak reposition and
   - data collection of hydrology, hydrometry and agriculture.

In the period of Repelita IV the government makes effort to motivate the farmer's society to utilize the irrigation water supply for the establishment of new rice-fields, beside to intensify the irrigation of the existing rice-fields and plantation. Besides, the groundwater development activities shall be increased, particularly in the dry and critical agriculture regions, among other things for the island of Nusa Penida, Nusa Dua Area, West Bali and others. To have an optimum utilization of the existing irrigation network, the tertiary and quartiary networks have to be developed continously. Besides, the consciousness, the capability and the participation of society have to be intensified in its efforts to protect the water channels and water supply installations and to distribute the water more efficienty by way of giving guidelines and intensifying the farmer's groups and Subak organizations involvement.

The "Subak" is a farmer's organization which exists since ancient time in Bali and is a traditional law society with a social-agriculture, religions and economic character. The Balinese society has the preference to maintain

e. **program** penelitian pertanian dan pengairan dengan hasil :
   - P3 SA
   - studi pengembangan air di tanah Bali Utara dan Barat
   - studi pengembangan sayur mayur di Bedugul
   - studi pengembangan Rawa Perancak dan
   - kumpulan data hidrologi, hidrometri dan pertanian.

Pada periode Repelita IV pemerintah berusaha mendorong masyarakat petani untuk memanfaatkan air irigasi yang tersedia dengan mencetak sawah-sawah baru, disamping mengintensifikasikan pengairan sawah-sawah yang telah ada dan air irigasi untuk perkebunan. Selain itu kegiatan-kegiatan pengembangan air tanah ditingkatkan khususnya di daerah-daerah pertanian kering dan rawan antara lain untuk Pulau Nusa Penida, kawasan Nusa Dua, Bali Barat dan lain-lain. Untuk memanfaatkan jaringan-jaringan irigasi yang telah ada secara optimal, maka jaringan tersier dan kwarter perlu dikembangkan terus. Selanjutnya perlu ditingkatkan juga kesadaran, kemampuan dan peran serta masyarakat dalam usaha-usaha pemeliharaan saluran dan bangunan-bangunan pengairan serta pengaturan air secara lebih efisien, antara lain dengan membina dan mengembangkan kelompok-kelompok Petani Pemakai air atau organisasi subak.

Sebagaimana diketahui "Subak" adalah merupakan organisasi para petani di daerah Bali yang merupakan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis yang secara historis telah ada sejak dahulu kala. Masyarakat di Bali mempunyai kecondongan atau cenderung untuk mempertahankan lembaga subak, karena subak tidak dianggap sebagai lembaga yang ketinggalan zaman, tetapi mampu menyesuaikan keadaannya dengan perkembangan zaman. Kedinamisan subak walaupun bersifat tradisional karena tetap melestarikan kewajiban utama subak, erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan dengan melihat keberhasilan pelaksanaan program Bimas. Semakin baik subak mengelola lembaganya (walaupun tidak terlepas kaitannya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan), maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di subak tersebut. Hal ini dapat dipakai sebagai indikator bahwa subak memang tidak ketinggalan zaman dan dirasakan untuk tetap dipertahankan. Subak tetap mampu menyesuaikan diri dengan derap langkap pembangunan. Sikap positif masyarakat terhadap kelestarian subak, merupakan salah satu potensi dalam melestarikan lembaga tradisional, khususnya lembaga subak untuk mewujudkan "Bali Menuju Pulau Taman".

Ditinjau dari wilayahnya, subak merupakan suatu areal persawahan yang pada umumnya memperoleh air dari satu sumber pemasukan. Di seluruh Bali diperkirakan terdapat ± 1.280 buah lembaga subak dengan areal persawahan seluruhnya 100.429,50 Ha. Lembaga subak ini berkembang terutama di daerah pedesaan dan bukan merupakan yang asing bagi masyarakat di daerah Bali. Lembaga subak bukan hanya sekedar dikenal namanya tetapi dipahami oleh masyarakat, potensi ini perlu dikembangkan terus agar lembaga subak benar-benar membudaya di masyarakat.

2. Industri

Sebagian besar industri yang tumbuh dan berkembang di Bali adalah sektor Industri Kecil Kerajinan Rakyat (75%) dan umumnya berlokasi di pedesaan dan selebihnya adalah industri sedang.

Pembangunan industri di Bali lebih diarahkan untuk meningkatkan dan lebih mempercepat pertumbuhannya demi terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang. Juga diarahkan pada usaha memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor serta meningkatkan ekspor hasil-hasil industri.

Dalam Pelita III merupakan saat dimulainya pelaksanaan investasi di berbagai industri yang akan selesai dan mulai berproduksi dalam awal Pelita IV, dalam rangka menciptakan kaitan erat dan saling menghidupi antara Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

Industri di Bali menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, karena pada Pelita III tidak kurang dari 28.000 unit usaha yang ada mampu menyerap tenaga kerja ± 72.000 orang. Pada tahun 1981/1982 jumlah tersebut berkembang menjadi 44.619 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja ± 103.000 orang. Perincian per Kabupaten dapat dilihat pada Tabel III-18.

Pembangunan dan pembinaan sektor industri umumnya di Bali adalah merupakan bagian yang tak dapat dilepaskan dari pembangunan nasional, dimana secara obyektif Pulau Bali tidak mempunyai sumber-sumber bahan mineral yang potensial untuk dikembangkan disamping untuk mengurangi dampak negatif terhadap sub sektor Pariwisata. Dengan demikian pembinaan dan pengembangan sektor Industri di Bali lebih diarahkan kepada Industri Sedang, Kecil dan Industri Kerajin-

the subak because this organization is still in line with the present. Its dynamism, even though it has still to conservate the subak main obligation because of its traditional character, has close ties with the achievements of the development like the achievements of the Bimas programme. The better the management of the Subak (though still interconnected with the religious activities) the more higher is the increase in achievements of the development programme execution. This indicates that the subak is still up-to-date at present and can still be maintained. It is capable to keep pace with the increase of the development. The positive attitude of the society concerning the conservation of the subak is one of the potentials in the protection of this traditional institute, in particular the subak organization to make "Bali the paradise island" a reality.

From the regional point of view the subak is a ricefield area which is generally irrigated from one water supply source. In the whole island of Bali there are about 1,280 subak organizations with a total of 100,429,50 Ha ricefield area.

The subak organization has developed mainly in the rural regions and is well known in the society of Bali. Its name is not only just known but it penetrates into the heart of the population. This potential has to be developed so that the subak organization really becomes a culture in the society. (Source: Regional Office of the Department of Agriculture in Bali, 1984).

2. Industry

A big part of the growing Industry which has developed in Bali is the light home industry (75%) which is generally located in the rural areas and the remainder is the medium industry.

The industrial development in Bali is aimed to intensify and to speed up its growth for the sake of a more-balanced economic structure. And besides, to expand employment opportunities and to increase the industry so that it can reduce the needs of import goods and increase the export of the industry products.

Pelita III was the starting point of the investments of all kinds of industry which should be finished and which was planned to produce at the beginning of Pelita IV in the framework of synchronizing the light, medium and heavy industries.

The industry in Bali has made good progress. For example in Pelita III about 28,000 industrial units had been able to employ ± 72,000 employees. In 1981/1982 this amount increased to 44,619 units with ± 103,000 employees. The details in every district can be seen in Table III-18.

Tabel / *Table III — 18*

UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA DI SEKTOR INDUSTRI KECIL/ KERAJINAN PER KABUPATEN DI BALI TAHUN 1981/1982
INDUSTRIAL UNITS AND EMPLOYEES IN THE LIGHT/ HOME INDUSTRY PER DISTRICT IN BALI IN 1981/1982

Nomor *Number*	Kabupaten *District*	Jumlah Unit usaha (bh) *Total industrial units (units)*	Jumlah Tenaga Kerja (orang) *Total employees (persons)*
1	Buleleng	6.703	16.325
2	Klungkung	4.566	6.347
3	Jembrana	4.533	8.767
4	Karangasem	9.293	11.435
5	Gianyar	5.529	17.472
6	Tabanan	6.006	13.840
7	Bangli	3.179	4.682
8	Badung	4.810	13.150
	B a l i	44.619	92.018

In general the development and promotion of the industrial sector in Bali is one unity with the national development, in which the island of Bali objectively has no potential minerals to be developed besides to minimize the negative impact for the tourism sector. So the development and promotion are aimed at the medium, light and home industries with the hope to reach optimum achievements in the future.

The promotion and development of the light industry mainly has the aim to motivate the rural society. This light industry with low capital investment, bad organization structure and unskilled employees had to face the ever-growing technology development. In 1980/1981 there were 3,348 light industrial units with 84,519 employees which produced 109 kinds of commodities in 8 districts of Bali. One of the these commodities is the cagcag textile which is one of the home industry products since ancient time with all its internal problems.

The medium industry has been developed by taking into consideration the development of the other sectors, in particular the tourism and natural living environment.

an Rakyat yang kelak diharapkan dapat membangkitkan suatu hasil yang optimal.

Pembinaan dan pengembangan industri lebih diarahkan pada kelompok industri kecil terutama dalam rangka membangkitkan masyarakat pedesaan. Industri Kecil yang para pengrajinnya lemah modalnya, struktur organisasi yang kurang baik serta tingkat keterampilan yang rendah dihadapkan pada perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Hingga Tahun 1980/1981 di Bali terdapat 3.348 unit kegiatan industri kecil dengan menyerap 84.519 orang tenaga kerja dengan 109 jenis komoditi yang tersebar di 8 Kabupaten. Salah satu dari ke 109 jenis komoditi tersebut adalah tenun cagcag, yang merupakan kerajinan rakyat yang tumbuh sejak dahulu dan dihadapkan dengan berbagai masalah yang ada di dalam industri kecil.

Untuk Industri Sedang terus dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan sektor-sektor lainnya terutama sektor pariwisata dan sektor pengelolaan alam dan lingkungan hidup. Perkembangan industri sedang diarahkan terutama untuk agro industri serta industri lainnya yang bersifat menunjang industri hilir yang terdapat di daerah lain.

Pulau Bali yang pada dasarnya kaya dengan tenaga kerja yang rajin-rajin, ulet dan berjiwa seni, namun di lain pihak tidak begitu kaya dengan bahan baku, sumber alam yang sedikit jumlahnya. Berdasarkan hal-hal tersebut agak sukar untuk diarahkan kepada pertumbuhan industri berat, sehingga dengan demikian bidang kerajinan memegang peranan penting. Barang-barang kerajinan Bali mempunyai ciri-ciri yang khas, dikagumi dan disenangi oleh wisatawan, dalam dan luar negeri.

Industri Kerajinan yang tersebar di Pulau Bali mempunyai jenis, corak dan disain yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya tetapi mempunyai persamaan prinsip, yakni berdasarkan pada unsur keagamaan dan kebudayaan. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika keseluruhan penduduk Bali banyak seniman perpatungan, perhiasan-perhiasan seni yang dibuat dari kayu, anyaman, melukis, mengukir tulang/gading/tanduk/batok kelapa, kerajinan dari kuningan, aluminium dan keramik.

Dalam seni pahat patung bahan-bahan yang dipakainya ada yang dihasilkan dari Bali sendiri dan ada juga yang didatangkan dari luar Jawa. Diperkirakan dari setiap 1 M^3 kayu dapat menghasilkan sekitar 60 sampai 80 buah patung dengan ukuran tinggi 23 inci. Juga diperlukan bahan-bahan pembantu seperti amplas, semir sepatu, cat dan lain-lain bahan untuk menghaluskan patung.
Seni ukiran tulang terdapat di beberapa desa di Gianyar dan Bangli seperti Tampak Siring, Manukaya Pring dan Sidem Bunut dengan jumlah pemahat ± 300 orang. Adapun tulang-tulangnya diperoleh dari pabrik daging kaleng (tulang sapi) Cip di Denpasar, disamping itu mereka juga mengukir gading, tanduk dan tempurung kelapa.

Pengrajin perak diperkirakan sebanyak 600 orang yang berada di desa Celuk, Singapadu, Kamasan, Beratan, Tejakula dan Petemon. Dan hampir di setiap desa dalam rumah penduduk ada terdapat alat tenun yang disebut cagcag dengan jumlah kurang lebih 110.000 buah alat tenun, yang 500 diantaranya menenun songket dengan benang sutera, benang emas dan benang perak yang semuanya itu harus diimpor. Sedangkan kerajinan anyaman di Bali yang terkenal indahnya adalah hasil kerajinan daerah Bone, Nyuh Kuning dan Pengosekan (Gianyar). Daerah Karangasem menghasilkan tikar dan anyaman keranjang dalam jumlah besar. Biasanya kerajinan anyaman yang disukai oleh wisatawan dalam bentuk topi, tas, alas piring yang dibuat dari daun lontar. Kemudian pusat-pusat pembuatan gong yang terbuat dari perunggu ada di Blahbatuh (Gianyar), Tihingan (Klungkung), Sawan dan Jagaraga (Buleleng), hasilnya dipakai setempat untuk keperluan upacara Agama.

Menyadari akan barang-barang hasil kerajinan merupakan buah karya tangan rakyat, maka agak sulit untuk mencatat kapasitas produksinya. Akan tetapi berdasarkan catatan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali pada Tahun 1982, perusahaan yang bergerak dalam industri kerajinan di Bali pada Tahun 1978/1979 sebanyak 2.782 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 72.429 orang, tahun 1979/1980 tercatat 2.990 buah dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 80.030 orang, Tahun 1981/1982 tercatat 3.409 buah dengan menyerap tenaga kerja 87.991 orang.

Jika dilihat kerajinan rakyat yang lain seperti pakaian jadi, berkembang cukup pesat. Pesatnya industri pakaian jadi terlihat dari timbulnya industri-industri rumah tangga yang begitu banyak dan tersebar meliputi daerah perkotaan dan sampai pedesaan. Menurut laporan tahunan 1982 Dinas Perindustrian Propinsi Bali, ada sekitar ± 50 buah perusahaan pakaian jadi dan 100 kelompok pengrajin dengan melibatkan sekitar 14.000 orang pengrajin pakaian jadi.

3. Pertambangan dan Energi

Bahan galian yang sudah diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Bali selama ini adalah bahan galian golongan "C", seperti batu

It is aimed mainly at the agricultural industry and those which support the down-stream industry in the other regions.

The island of Bali has many manpower resources. They are industrious, tough and have feelings for Art, but the island on the other hand has not enough raw material and natural resources. Based on these condition it is rather difficult to form a heavy industry, so the art sector has to play an important role. The Balinese Art products have a typical character and are admired and in great demand by foreign and domestic tourists.

The handicraft industry which is spread over the island of Bali has a variety of types, motives and design but still this different kinds of art ha one common principle, i.e. the principle based on religious and cultura elements. So it is not surprising if the whole population of Bali consists o many artists in sculpturing, in wooden ornaments, in straw or mats plaiting in coconutshell/horn/ivory/bone carving, in brass, alluminium and ceramic handicrafts.

The material used in sculpturing art comes from Bali but some of it ha to be imported from other islands. It has been estimated that from every 1 M^3 wood about 60 to 80 pieces of 23 inches high sculptures can be produced Auxiliary materials like sandpaper, shoe polish, paint and other things to polish the sculptures are also necessary.

The bone carving can be found in some villages in the districts of Gianyar and Bangli like Tampak Siring, Manukaya Pring and Sidem Bunut with about 300 sculptors. The bones supplier is the corned meat factory (Cip in Denpasar. Beside bones those sculptors use also ivory, horn and coconu shells as raw material.

There are about 600 handicraftsmen in silver ornaments making in th villages of Celuk, Singapadu, Kamasan, Beratan, Tejakula and Petemon In every house of nearly all villages there is a weaving loom, they called i the "cagcag" (read : chagchag).

There are about 110,000 pieces of weaving looms. 500 pieces out of thos amount are used to produce "songket" (fabric woven by using thread ornamen tation) with silk, gold and silver threads. These materials hava to b imported. The most famous handicrafts in plaiting because of their beaut come from the regions of Bone, Nyuh Kuning and Pengosekan (Gianyar) The region of Karangasem produces a big quantity of mats and baske plaitings. The most popular plaiting handicrafts for tourists are in the form of hats, bags and saucers made of "lontar" leafs (from a fan-palm, Borassu flabellifer). Next are the production centres of the "gong" which is mad of bronze. These centres can be found in the villages of Blahbatuh (Gianyar) Tihingan (Klungkung), Sawan and Jagaraga (Buleleng). The gongs will b used for religious ceremonies in the own villages.

Since the handicraft art goods are made by the people, it is rathe difficult to record the capacity of production. Nevertheless based on the recora of the Regional Office of the Department of Industry in the province of Ba in 1982, the amount of companies in the field of handicraft art industry i 1978/1979 was 2,782 units with 72,429 employees, in 1979/1980 was 2,99 units with 80,030 employees and in 1981/1982 was 3,409 units with 87,99 employees.

From the people's handicraft point of view, garment industry has mad great progress. This can be observed in the many home industries which ar spread in the rural and urban areas. In accordance with the 1982 report of the Industrial Office of the Province of Bali, there were about 50 garmer factories and 100 craftsmen associations with about 14,000 garment cra men and women.

3. Mining and Energy

Minerals which are known and utilized by the society of Bali until no belong to the "C" group of minerals like river stone, sand, gravel, rock ston and coral stone. Other types have still to be researched by taking inventor mapping, making exploration and exploitation of natural resources, i.e. th source of mineral and energy.

The mining of the group C minerals, in particular sand, has been fre quently done in the districts of Klungkung, Badung and Tabanan, wherea big amounts of rock-stone can be found in the districts of Badung, Bangl Gianyar and Tabanan. The mining of mountain limestone has been don in the region of Jimbaran; a deposit of this material is also found in Nus Penida and in the West region of the District of Buleleng. But over-exploitatio of this minerals within irregular period my cause problems in the preserva tion of physical as well as social millieu. (See Table III-19).

In the period of Repelita IV researches in the mineral potentials of grou C, B and A, in mining products and energy potential, promotion and info mation in protecting natural environs and utilization of multi-purpos technology will be executed.

The development of electricity as one of the main energy source has bee expanded continuously to fulfill the requirements of the society, to increas the industrial sector, the communication sector, the educational sector an other sectors in the urban as well as in the rural areas with a good servic quality.

kali, pasir, kerikil, batu padas, batu karang. Untuk bahan galian yang lain diperlukan adanya penelitian yang lebih lanjut berupa inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam berupa sumber mineral dan energi.

Penambangan bahan galian golongan C terutama berupa pasir banyak dilakukan di Kabupaten Dati II Klungkung, Badung dan Tabanan, sedangkan batu padas banyak terdapat di Kabupaten Dati II Badung, Bangli, Gianyar dan Tabanan. Penambangan batu kapur bukit dilakukan di daerah Jimbaran dan deposit bahan ini juga terdapat di Nusa Penida dan wilayah Kabupaten Buleleng bagian barat. Akan tetapi pengambilan bahan galian ini secara berkelebihan dan tidak teratur dapat menimbulkan masalah terhadap kelestarian lingkungan fisik maupun sosial. Lihat Tabel III-19.

Dalam periode Repelita IV dilaksanakan penelitian potensi bahan galian golongan C, B dan A, penelitian bahan tambang dan potensi energi serta pembinaan dan penyuluhan kelestarian alam dan penerapan teknologi tepat guna.

Pembangunan kelistrikan sebagai salah satu bentuk energi utama dikembangkan terus untuk memenuhi keperluan masyarakat, peningkatan sektor industri, sektor komunikasi, sektor pendidikan dan sektor lainnya di kota maupun di desa dengan mutu pelayanan yang baik.

Selain tenaga listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara, telah dikelola juga biomasa di beberapa desa, karena energi kayu masih merupakan energi utama di desa-desa terutama untuk keperluan masak memasak. Khsusus untuk penyediaan tenaga listrik, dari Pelita I s/d IV dapat dilihat dalam Tabel III-20.

Adapun jumlah pelanggan menurut golongan tarif Desember 1983 adalah sbb. :

- rumah tangga 85.387 (92,2%)
- usaha 3.621 (3,91%)
- industri 403 (0,44%)
- lain-lain 3.201 (3,45%)

Dan VA tersedia menurut golongan tarif Desember 1983 adalah : rumah tangga 47.387.700 (55,79%), usaha 7.825.400 (9,21%), industri 18.518.450 (21,8%) dan lain-lain 11.207.333 (13,2%). Sedangkan penjualan tenaga listrik (KWH) menurut golongan tarif Desember 1983 : rumah tangga 43.162.561 (44,8%), usaha 7.954.177 (8,27%), industri 32.839.388 (34,15%) dan lain-lain 12.202.754 (12,69%).

Keadaan ini dikembangkan untuk meningkatkan keandalan serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Tetapi dengan adanya keterbatasan dana mengakibatkan perkembangan keperluan tenaga listrik belum dapat diimbangi dengan penyediaan dananya. Usaha listrik masuk desa dalam Repelita IV pun lebih ditingkatkan lagi untuk mendorong kegiatan sosial dan ekonomi di daerah pedesaan sehingga akhir Pelita IV diharapkan seluruh desa di Bali sudah berlistrik. Dalam hubungan ini perlu dikembangkan penggunaan sumber energi yang tersedia, seperti : tenaga air mikro, tenaga angin, tenaga biogas dan lain-lain dalam rangka hemat penggunaan bahan bakar minyak serta sekaligus mengurangi kerusakan, tanah dan air. Untuk meningkatkan keandalan sistem penyediaan tenaga listrik di Bali, maka direncanakan interkoneksi jaringan listrik Jawa - Bali dengan kabel laut dan transmisi 150 KV dari Gilimanuk ke Denpasar terus ke Singaraja serta membangun gardu-gardu induk. Sejalan dengan itu di daerah Bedugul telah dilakukan survey yang hasilnya menunjukkan adanya potensi tenaga panasbumi sebesar 180 MW.

4. Perhubungan

Pembangunan prasarana angkutan dan perhubungan lainnya ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta manusia ke seluruh daerah terutama pada daerah-daerah terpencil, sehingga bisa menunjang sarana-sarana pembangunan dan tersedianya pelayaran angkutan yang lebih baik, murah, teratur dan lancar. Sedangkan pembangunan jalan mengutamakan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada, sementara itu pembangunan jalan baru dilakukan untuk dapat meningkatkan serta meratakan pembangunan daerah/wilayah, terutama jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya serta membuka lisensi daerah tersebut.

Mengingat Bali merupakan daerah turisme yang bertaraf internasional keadaan perhubungannya sudah cukup lama berkembang dan beberapa tahun terakhir banyak mengalami perbaikan.

a. Jaringan Jalan

Pembangunan prasarana jaringan jalan ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pembangunan yang ditekankan pada pembangunan sektor Pertanian dan Pariwisata dalam arti luas. Sekaligus menunjang pengembangan satuan wilayah pembangunan untuk mencapai pemerataan kegiatannya maupun hasil pembangunan itu sendiri.

Tabel / *Table III — 19*

LUAS AREAL TAMBANG BAHAN GALIAN INDUSTRI SERTA PRODUKSINYA PER KABUPATEN DI BALI TAHUN 1983 DAN 1984
MINING AREA SURFACE OF INDUSTRIAL MINERALS AND PRODUCTION PER DISTRICT IN BALI 1983 / 1984

Kabupaten *District*		Batu Padas *Rockstone*		Pasir *Sand*		Tanah Liat *Clay*		Batu Kerikil/Koral *Gravel/Coralstone*		Batu Kali *Riverstone*		Batu Kapur *Limestone*		Penggaraman *Salt processing*	
		Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*	Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*	Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*	Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*	Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*	Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*	Luas (Ha) *Surface*	Produksi (M3) *Production*
(1)		*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1. Jembrana		–	–	–	52.980	19,21	8.217	–	25.100	2,049	16.130	–	2.716	–	330
2. Tabanan		27,07	125.519	15,99	12.605	64,29	3.735	–	3.985	47,5	22.438	–	–	–	2.270
3. Badung		5,54	376.738	12,81	1.369,072	–	28.440	–	–	–	91	17,34	618	–	170
4. Gianyar		4,19	22.323	21,5	106.460	6,98	45,660	–	–	2,56	134	–	–	–	–
5. Klungkung		1,53	2.385	5,91	407.100	18,34	65.852	–	–	0,36	18.230	0,34	800	–	3200
6. Bangli		0,10	23.816	–	210	0,73	8.076	–	–	–	3.891	–	–	–	–
7. Karangasem		6	250.000	60,07	113.521	1,04	21.300	–	–	15,12	27.422	4,4	1.602	–	878.979
8. Buleleng		0,80	1.626	8,37	72.109	30,35	68.192	–	1.120	38,34	37.945	17,55	18.500	–	11.330
Bali	1984	38,51	802.407	133,371	2.134.057	146,224	2.249.472	–	30.185	105,929	126.281	30,63	24.236	–	896.299
	1983	–	2.062.894	–	2.211.092	–	273.604	–	77.628	–	124.975	–	19.923	–	788.144

Sumber : Statistik Kecamatan Dep. Pertambangan dan Energi Jakarta untuk Luas Areal
Source : Sub-district Statistics. The Department of Mining and Energy in Jakarta.

Tabel / *Table III — 20*

KEADAAN KELISTRIKAN AWAL PELITA DI PROPINSI B A L I
SUPPLY OF ELECTRICITY AT THE BEGINNING OF THE PELITA IN BALI

No.	Uraian *Description*	I	II	III	IV
1.	KW Terpasang *KW installed*	3.586	33.037	35.384	63.842
2.	KW Produksi *KW production*	8.799.787	33.867.719	96.449.837	119.163.096
3.	Pelelangan *On tender*	7.472	13.877	45.360	92.612
4.	Listrik Desa *Rural electricity*	—	59	185	355

Di Propinsi Bali jaringan jalan yang ada, yang menghubungkan kota dengan kota serta antara kota dengan pedesaan sangat baik. Propinsi Dati I Bali memiliki jaringan jalan sepanjang 3.787,30 Km, dibedakan menurut statusnya sebagai berikut :

- Jalan Negara, 417,7 Km (11,03%)
- Jalan Propinsi, 340 Km (8,98%)
- Jalan Kabupaten, 3.029,60 Km (79,99%)

Jumlah .... 3.787,30 Km (100%)

Lihat Tabel III-21.

Walaupun pada umumnya kondisi jalan di daerah Bali cukup baik, namun masih ada jalan dalam keadaan rusak.

- Jalan Negara :
  - a. Baik .... 273,38 Km (65,45%)
  - b. Sedang .... 143,17 Km (34,28%)
  - c. Rusak .... 1,15 Km (0,26%)
  - d. Rusak Berat .... Km
- Jalan Propinsi :
  - a. Baik .... 179,68 Km (52,85%)
  - b. Sedang .... 124,76 Km (36,69%)
  - c. Rusak .... 35,06 Km (10,31%)
  - d. Rusak Berat .... 0,50 Km (0,15%)

Tabel / *Table III — 21*

PANJANG JALAN DI BALI MENURUT KABUPATEN DAN STATUSNYA, AKHIR TAHUN 1985 (KM)
ROAD LENGTH AND CLASSIFICATION IN THE DISTRICTS OF BALI AT THE END OF 1985 (KM)

Kabupaten / *District*		Status Jalan / *Road classification*			Jumlah / *Total*	%
		Jalan Negara *State Road*	Jalan Propinsi *Provincial Road*	Jalan Kabupaten *District Road*		
1. Jembrana		58,60	35,00	221,80	315,40	8,33
2. Tabanan		56,40	33,00	650,05	739,45	19,52
3. Badung		106,50	15,00	390,00	511,50	13,51
4. Gianyar		57,80	—	276,40	334,20	8,82
5. Klungkung		—	44,20	220,00	264,20	6,98
6. Bangli		78,00	—	340,15	418,15	11,04
7. Karangasem		—	75,80	386,85	462,65	12,22
8. Buleleng		60,40	137,00	544,35	741,75	19,58
Jumlah	1985	417,70	340,00	3.029,60	3.787,30	100,00
Total	1984	417,70	340,00	3.029,60	3.787,30	X
	1983	417,70	340,00	1.638,01	2.395,71	X
	1982	417,70	340,00	1.638,01	2.395,71	X
	1981	417,70	340,00	1.638,01	2.395,71	X

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bali
Source : Public Works Office, the Province of Bali.

Dengan banyaknya sungai dan kail kecil mengakibatkan terputusnya jalan yang ada. Sehingga diperlukan suatu penghubung berupa jembatan, yang hingga akhir tahun 1985 jumlah jembatan yang telah dibangun sebanyak 191 buah dengan panjang seluruhnya 5.187,42 M yang terdiri dari jembatan Nasional/Negara 2.831,76 M dan jembatan Propinsi 2.355,66 M.

Adapun jenis konstruksi jembatan tersebut adalah :

a. Jembatan composit sebanyak 12 buah dengan panjang bentangan 493.00 M, yang terdiri dari jembatan Negara 243 M dan jembatan Propinsi 250 M,

b. Jembatan beton sebanyak 135 buah dengan panjang bentangan 4.124,42 dengan rincian statusnya : jembatan Nasional/Negara 2.408,39 M dan jembatan Propinsi 1.716,03 ;

Beside the electrical power supply from the State Electric Company (PLN, Perusahaan Listrik Negara) the biomass has also been utilized in some of the villages, since the energy of wood is still the main energy supplier in the villages, in particular for use in the kitchens. The electrical power supply since Pelita I until Pelita II can be seen in Table III-20.

The number of customers in accordance with the tariff classification in December 1983 was as follows :

- *household* 85,387 (92,2%)
- *business* 3,621 (3,91%)
- *industry* 403 (0,44%)
- *others* 3,201 (3,45%)

And the amount of available VA in accordance with the tariff classification in December 1983 was : 47,387,700 (55,79%) household, 7,825,400 (9,21%) for business, 18,518,450 (21,8%) for Industry and 11,207,333 (13,2%) for others.

Whereas the sale of electric power (in KWH) in accordance with the tariff classification in December 1983 was : 43,162,561 (44,89%) for household, 7,954,177 (8,27%) for business, 32,839,388 (34,15%) for industry and 12,202,754 (12,69%) for others.

This condition is to be extended to increase the reliability of electric power distribution and to improve service for the society. But unfortunately the needs for electric power has not be well met because of the budget limit.

The efforts in Repelita IV to supply electricity in rural regions has been intensified to encouraged the social and economic activities so that at the end of Pelita IV all the villages in Bali may have electricity. In accordance with this plan the utilization of available energy sources sush the micro hydro energy, the wind energy, the biogas energy, and others have to be developed in the framework of fuel saving and at the same time to minimize land and water pollution. To improve the reliability of the electric power distribution system in Bali plans have been made to interlink the Java-Bali electricity network with a sea-cable and to transmit 150 KV from Gilimanuk to Denpasar and further to Singaraja beside to establish main transformer stations. In line with this plan a survey has been executed in the region of Bedugul in which a potential of 180 MW geothermal energy has been found.

4. Communication

The development of transportation facilities and other communication systems has the aim to accelerate the flow of goods and services including travellers to go to the regions and in particular to isolated zones so that it can support the development facilities and the establihment of a better, cheaper, regular, and smooth transportation service. Whereas road development is stressed on the rehabilitation of the existing roads, meanwhile new roads have been also constructed to improve and equit development in the regions, in particular those roads which link the production centres with marketing zones, and to open the isolation of this region. Taking into consideration that Bali is a tourist region with an international standard, it is natural that its communication system has been developed for quite a long time and in the recent years it has made many improvements.

a. Road network

The creation of the public utilities of road network is aimed to support the development activities, in particular the tourism and agricultural sectors. At the same time it supports the expansion of development zone to achieve equitable activities as well as the results of the development itself.

The road network in Bali which connects the cities including the villages is good. The length of the whole road network in the Province of Bali is 3,787,30 Km and is classified in :

- *State roads* 417,7 Km (11,03%)
- *Provincial* 340 Km (8,98%)
- *District roads* 3,029,60 Km (79,99%)

The total length is 3,787,30 Km (100%)

The development of the Road Network in Bali until 1985 can be seen in Table III-21.

Altough in general the road condition in Bali is good, yet there are still bad ones.

- *State road* :
  - *a. Good* .... 273,38 Km (65,45%)
  - *b. Fair* .... 143,17 Km (34,28%)
  - *c. Bad* .... 1,15 Km (0,26%)
  - *d. Damaged* .... Km
- *the Provincial Highway* :
  - *a. Good* .... 179,68 Km (52,85%)
  - *b. Fair* .... 124,76 Km (36,69%)
  - *c. Bad* .... 35,06 Km (10,31%)
  - *d. Damaged* .... 0,50 Km (0,15%)

In Bali, roads are cut by big and small rivers. So this roads have to be connected by bridges. The amount of the constructed bridges until the end of 1985 was 191 pieces with a total length of 5,187,42 M which consisted of 2,831,75 M State bridges and 2,355,66 M Provincial bridges. The types of the constructed bridges were :

c. Jembatan baja sebanyak 44 buah dengan panjang bentangannya 570 M dengan rincian statusnya jembatan Nasional/Negara 180 M. dan jembatan propinsi sebanyak 390 M.

Jaringan jalan Negara dan Propinsi Dati I Bali dalam Pelita III telah ditangani melalui berbagai program, antara lain :

a. penunjangan dan rehabilitasi jalan dan jembatan Dati I Bali,
b. pembuatan jalan/jembatan baru,
c. penunjangan jalan dan sarana perhubungan kota Kabupaten Dati I Bali dan
d. penunjangan jalan dan jembatan serta penggantian jembatan Dati I Bali.

Sedangkan jalan Kabupaten ditangani melalui program-program : Inpres Dati II, Inpres Penunjang Jalan, Padat Karya/AMD dan APBD Tingkat Tk II.

b. Perhubungan Darat

Pertumbuhan sarana angkutan jalan raya dari tahun ke tahun untuk segala jenis angkutan seperti mobil penumpang, mobil barang, angkutan wisata maupun sepeda motor, menunjukkan angka atau laju pertumbuhan yang semakin meningkat. Prosentase rata-rata kenaikan per tahun dalam Pelita III sebesar 18,59% dengan masing-masing kenaikan sebagai berikut : mobil penumpang 18,08%, mobil barang 20,49%, mobil bus 12,66% dan sepeda motor kenaikan rata-ratanya per tahun sekitar 23,13%. Lihat Tabel III-22.

Dari perincian tersebut dapat dilihat bahwa yang memegang rekor tertinggi laju kenaikannya adalah sepeda motor.

Disamping itu selama Pelita III berbagai jenis angkutan mengalami kenaikan juga, seperti :

a. Angkutan kota dan batas kota yang tersebar di 6 Kabupaten: Denpasar sebanyak 1.273 unit, Tabanan 78 unit, Singaraja 242 unit, Karangasem 42 unit, Gianyar 8 unit dan Negara sebanyak 21 unit. Angkutan ini terdiri dari bermacam jenis merk kendaraan, yang sebagian besar dalam bentuk Mikrolet.
b. Angkutan antar Propinsi berupa : angkutan penumpang dengan bus dan angkutan barang dengan truk, dengan kecenderungan (trend) kenaikan masing-masing sebesar 2,5% dan 30% per tahun.
c. Angkutan antarkota secara keseluruhan 11% per tahun, dan angkutan pariwisata 7,03%.
d. Angkutan pedesaan dan angkutan khusus tangki, dengan kecenderungan kenaikan masing-masing sebesar 17% dan 7,5% per tahun.

Untuk mengimbangi kenaikan jenis kendaraan, perkembangan arus barang dan penumpang, dalam Pelita III diadakan peningkatan-peningkatan fasilitas angkutan jalan raya berupa : pemasangan traffic light, rambu jalan, jembatan timbang, pembangunan 1 unit pengujian kendaraan otomatis serta pengadaan alat operasional lainnya yang diperlukan.

c. Perhubungan Laut

Pulau Bali dengan keadaan geografi dan kebudayaannya menitik beratkan pemasukan daerahnya pada sektor Pertanian dan Pariwisata. Dengan titik tolak prinsip tersebut maka fungsi utama pelabuhan-pelabuhan di Bali diarahkan pada kegiatan yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan penumpang dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya.

Dengan demikian angkutan laut di Bali semakin berperan karena merupakan salah satu sarana untuk perdagangan antar Pulau, antar Negara serta pelayaran bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali melalui laut. Pelabuhan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana merupakan pelabuhan penyeberangan ferry yang menghubungkan Bali - Jawa dan sebaliknya, sedangkan pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem merupakan gabungan yaitu penyeberangan ferry yang menghubungkan Bali - NTB (Pulau Lombok) dan pelabuhan pelayaran/perdagangan antar Pulau. Disamping itu terdapat pula dua buah pelabuhan laut yang khusus melayani pelayaran perdagangan antar Pulau dan antar Negara, yaitu pelabuhan Laut Benoa di Kabupaten Badung dan pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng.

Pelabuhan Benoa, dilihat dari Pelita I hingga Pelita II cukup banyak mengalami peningkatan kegiatan.

Sebelum Pelita I kegiatan bongkar muat yang ada sebanyak 17.330 ton, akhir Pelita I sebanyak 55.384 ton, akhir Pelita II sebanyak 145.836 ton dan dalam Pelita III hingga awal tahun Pelita IV telah mencapai 707.678 ton.

Di antara barang-barang yang dibongkar yang terbanyak adalah bahan bakar/minyak sekitar 65%, sedangkan barang yang dimuat kebanyakan komoditi beras yakni sekitar 96%. Kegiatan lainnya adalah melayani penumpang/wisatawan dan kegiatan ekspor dan impor antar Negara.

Pelabuhan Celukan Bawang, sebelum dioperasikan tahun 1978 kegiatan bongkar muat di pelabuhan ini hanya 14.483 ton, tetapi setelah

a. 12 composite bridges with 493 M span length, i.e. 243 M State bridges and 250 M provincial bridges,
b. 135 concrete bridges with 4,124,42 M span length, i.e. 2,408,39 M State bridges and 1,716,03 M provincial bridges,
c. 44 steel bridges with 570 M span length, i.e. 180 M State bridges and 390 M provincial bridges.

The State and Provincial Road Network in the Province of Bali in the period of Pelita III was handled by different programmes among other things :

a. embetterment and rehabilitation of roads and bridges,
b. construction of new roads and bridges,
c. embetterment of roads and the establishment of transportation facilities between the district place in Bali, and
d. embetterment of roads and replacement of old bridges.

The district roads on the other hand were handled by the Inpres Dati II, Inpres of road embetterment, the AMD (Army Forces Civic Mission) and the District APBD.

b. Land Communication

The yearly growth of public utilities on land transportation such as the number of passenger-cars, trucks, tourist buses, limousines and motorcycles has shown a rapid increase. The average yearly increase in percentage during Pelita III was 18,59% and specified as follows : 18,08% for passenger-cars, 20,49% for trucks, 12,66% for buses and 23,13% for motorcycles. (See Table III-22).

From this specification can be seen that the increase of the number of motor cycles had the highest record.

Tabel / ***Table III — 22***

PERKEMBANGAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI BALI TAHUN 1977 - 1982

NUMBER OF MOTOR VEHICLES IN THE PROVINCE OF BALI IN 1977 - 1982

Kendaraan / *Vehicle* — Tahun / *Year*	1979	1980	1981	1982
Sepeda Motor / *Motorcycle*	57.240	71.032	90.786	105.095
Mobil Barang / *Truck*	8.464	11.035	13.721	14.650
Mobil Penumpang / *Passenger car*	5.575	6.522	7.765	9.179
Bus / *Bus*	908	995	1.107	1.297
Jumlah / *Total*	72.187	89.584	113.379	130.220

Types of transportation had also shown an increase in quantity during Pelita III, among others :

a. Urban and sub-urban transportation, spreaded in 6 districts : in Denpasar 1,273 units, Tabanan 78 units, Singaraja 242 units, Karangasem 42 units, Gianyar 8 units, and Negara 21 units. These transportation facilities consist of all kinds of vehicles, most of them the microlet type.
b. Inter-province transportation i.e. for passengers by bus and for goods by truck. The trend to increase per year is 2,5% for buses and 30% for trucks.
c. Inter-city transportation with an increase of 11% per year and the tourist transportation with 7,03%.
d. Rural transportation and water/fuel tank transportation, each with a trend to increase by 17% and 7,5% per year.

During Pelita III land transportation facilities had been increased to match with the increase of vehicle types, the flow of goods and travelers. These facilities consisted of the installation of traffic-lights, road beacons, weight bridges, 1 unit of automatic vehicle test and other necessary operational accesories.

c. Sea Communication

The island of Bali with its geographical and cultural condition has its income mainly from the agricultural and tourism sectors. Based on this principle the main function of the harbours in Bali has been aimed to all activities which can support a quick flow of goods and passengers with all its facilities and public utilities involved.

Thus, the role of sea transportation in Bali becomes more and more important since it is one of the facilities for inter-insular and international trade and foreign tourists who enter the island by sea. The harbour of Gilimanuk in the district of Jembrana is a ferry harbour which gets passengers over from Bali to Java and Vice Versa, whereas the Padangbai harbour in the district of Karangasem is a ferry port to link the island of Lombok in NTB with Bali, as well as inter-insular harbour for sea transportation to the other islands. Besides, there are also two sea harbours which serve as an inter-insular and international business harbour. These two harbours are Benoa in the District of Badung and Celukan Bawang in the District of Buleleng.

dioperasikan mengalami peningkatan dari 20.213 ton - 92.794 ton (1979 - 1982). Kunjungan kapal di pelabuhan ini kebanyakan dari pelayaran khusus, pelayaran nusantara dan kemudian jenis pelayaran lokal. Sedangkan komoditi barang-barang yang dibongkar di pelabuhan ini adalah pupuk, semen dan bahan bangunan. Barang-barang yang dimuat kebanyakan hewan, buah-buahan, beras dan lain sebagainya.

Pelabuhan Padangbai, Arus naik turun penumpang di pelabuhan ini mengalami peningkatan sejak Pelita I hingga akhir Pelita II, yakni dari 6.833 orang menjadi 42.683 orang. Sedangkan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan ini pada akhir Pelita I mencapai 3.266 ton, kemudian akhir Pelita II 3.732 ton dan dalam Pelita III (1980) mencapai 14.888 ton.

Pelabuhan Gilimanuk, Fungsi utamanya adalah sebagai penyeberangan ferry Bali - Jawa, juga merupakan pintu gerbang ke luar masuknya barang dan penumpang yang datang dari Jawa maupun yang berangkat dari Bali.
Perkembangan arus penumpang ferry yang keluar masuk pelabuhan tahun 1985 tercatat sebanyak 948.374 orang yang datang dan 1.002.804 orang yang keluar dari Bali.
Disamping penumpang orang juga melayani angkutan barang-barang yang keluar masuk Bali, di antaranya gula pasir, tepung terigu, ikan asin, semen, pupuk dan lain sebagainya. Dan barang yang keluar berupa buah-buahan, ikan asin, besi tua, sapi, babi dan lain-lain.

Dilihat dari trend kegiatan bongkar muat dan arus penumpang yang selalu meningkat serta untuk menjamin bahwa pelayaran sub sektor Perhubungan Laut tersebut lancar, perlu adanya keseimbangan yang mantap antara permintaan dan fasilitas di satu pihak dengan fasilitas yang dapat diberikan dilain pihak. Untuk itu dalam periode Repelita IV ditingkatkan/ditambah fasilitas pelabuhan laut di 4 bidang, yaitu bidang : kepelabuhan, kesyahbandaran, sarana bantu navigasi dan bidang penjagaan laut.

d. Perhubungan Udara

Pelabuhan udara internasional Ngurah Rai adalah merupakan satu-satunya pintu gerbang Pulau Bali melalui udara dan merupakan salah satu kunci daripada perkembangan pariwisata di daerah Bali.

Dalam kegiatan penerbangan sipil di Indonesia, pelabuhan udara internasional Ngurah Rai merupakan pintu gerbang udara Indonesia bagian timur dalam hubungannya dengan Jepang dan Australia, juga merupakan tempat persinggahan dan mata rantai bagi jalur penerbangan dalam negeri khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

Arus lalu lintas udara di pelabuhan udara ini telah meningkat dengan pesat, sehingga mencapai ± 1.000.000 penumpang pada tahun 1981 dan diramalkan akan melampaui 2,4 juta penumpang pada tahun 1990.

Mengingat bandar udara ini merupakan bandar udara internasional, maka kegiatannya juga dibagi menjadi dua jenis yaitu penerbangan domestik (dalam negeri) dan penerbangan internasional (luar negeri). Jumlah pesawat udara yang melayani penerbangan domestik selama tahun 1985 yang datang sebanyak 9.245 buah dan yang berangkat 9.295 buah, sedangkan arus penumpangnya tercatat 305.753 orang yang datang dan yang berangkat 299.338 orang, kemudian penumpang yang transit sekitar 71.750 orang.
Adapun barang yang dimuat terdiri dari barang bagasi dan pos paket, barang yang dibongkar pun terdiri dari barang bagasi dan pos paket pula. Lihat Tabel III-23.

Adapun kegiatan penerbangan internasional dalam tahun tersebut cukup ramai, karena pesawat yang datang tercatat 1.954 buah dan yang berangkat 1.896 buah dengan rata-rata pesawat yang datang/berangkat per harinya antara 5 - 6 buah pesawat. Demikian juga dengan penumpangnya mengalami peningkatan. Sedangkan kegiatan bongkar/muat barang dalam jenis penerbangan ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu bongkar muat barang-barang bagasi, cargo (khusus) dan pos paket.

5. Telekomunikasi

Dengan modal utama yang dimiliki oleh Perumtel yaitu berupa transmisi, switching dan personil, diusahakan secara optimal untuk dapat memproduksi jasa secara maksimal dan pada akhirnya "pendapatan" yang diperoleh akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas modal utama yang sudah ada dan berusaha menambah kualitas modal utama melalui pembangunan. Dalam periode Pelita III Perumtel Witel VIII telah melaksanakan pembangunan/peningkatan operasional dalam bentuk pelayanan : telepon, teleks, telegram dan pelayanan alur sewa. Untuk bidang telepon, peningkatan secara kuantitatif maupun secara kualitatif ditandai dengan :

a. Pembangunan sentral telepon Otomat Sanur 600 SS,
b. Perluasan sentral telepon Denpasar dengan 2.000 SS,

The sea harbour of Benoa. *In the period of Pelita I until Pelita III this harbour had made sufficient progress in intensifying its activities. Before Pelita I the loading and unloading activities were 17,330 tons, at the end of Pelita I it was 55,384 tons, at the end of Pelita II it was 145,836 tons and in the period of Pelita III until the beginning of Pelita IV it was 707,678 tons. Most of the goods which had been unloaded, about 65%, consisted of fuel/oil, whereas the commodities which had been loaded, about 96%, consisted of rice. Other activities were services for passengers/tourists and for international export and import.*

The sea harbour of Celukan Bawang. *Before it was taken into operation, as a sea harbour, in 1978 the unloading activities were only 14,483 tons. After its operation it had increased from 20,213 tons to 92,794 tons (1979 - 1982). Most of the visiting sea vessels belonged to chartered voyages, to inter-insular and local shipping.*
In this harbour the unloaded goods were fertilizer, cement, and construction materials. Most of the loaded goods were animals fruits, rice and others.

The harbour of Padangbai. *Since Pelita I till the end of Pelita II the arrivals and departures of passengers in this harbour had increased from 6,833 persons to 42,683 persons. The loading and unloading activities at the end of Pelita I had reached 3,266 tons, at the end of Pelita II 3,732 tons and in Pelita III (1980) 14,888 tons.*

The harbour of Gilimanuk. *Its main function is as a ferry harbour to link Bali and Java. Besides it is also an entry-port for goods an passengers who are travelling between these two islands. The increase of ferry passengers flow which passed this harbour in 1985 was recorded at 948,374 arrivals and 1,002,804 departures from Bali. Beside the passengers this harbour also takes care of the transportation of goods from to the island of Bali, among other things cane sugar, flour, salted fish, cement, fertilizer and others. The exported goods are fruits, salted fish, scrap iron, cows, pigs and others.*

Considering the trend of increase in the loading and unloading activities the rising number of passengers and the guarantee of smooth running of sea communication sub-sector of shipping, it has been found necessary to improve the exact balance between the requirements and facilities on one side with the provision of facilities on the other. It is for this reason that in the period of Repelita IV the sea harbour facilities will be increased in the 4 fields of activities, i.e. the activities in harbour management, in harbour-mastering, in navigation aid facilities and in sea guarding.

d. Air Communication

The international airport of Ngurah Rai is the only entryport to the island of Bali by air and is one of the keys of tourism development in this region.

This airport is also the entry-p... of the Indonesian civil aviation activities in the East part of Indonesia i... ...s flight from Japan and Australia and is also a transit airport of the domestic aviation network in this part of the country.

The air traffic flow in this airport has made great progress. In 1981 about 1.000.000 passengers were recorded and it has been estimated that in 1990 it will rise to 2,4 millions or more.

There are two main activities in this international airport of Ngurah Rai, i.e. the domestic flights and the international flights. The record of the domestic flights in 1985 was 9,245 arrivals and 9,295 departures with 305,753 coming passengers and 299,338 leaving and in addition about 71,750 transit passengers. The loading and unloading of goods included baggages and postalparcels (See Table III-23).

In the same period the international flight activities were busy too. There were 1,954 arrivals and 1,896 departures with an average of 4 to 5 flights a day. The number of passengers had also increased. The loading and unloading activities consisted of three types, i.e. baggage, cargo (special) and postal-parcels.

5. Telecommunication

The Telephone Public (company) ***Perumtel*** *with its transmission equipments, switching panels and employees as the main capital has made optimum efforts to produce maximum service to the public, which at the end has resulted in the achievement of "income" to be utilized for the increase of the quality of its first investment i.e. rehabilitation and development of service facilities. In the period of Pelita III the Telephone District VIII (Witel VIII) of Perumtel had developed and intensified its telephone, telex, telegram and lease channel service by means of :*

a. development of the automatic telephone centre with 600 telephone connections in Sanur,
b. the development of the automatic telephone centre with 2,000 telephone connections in Denpasar,
c. the development of the automatic telephone centre with 2,000 telephone connections in Singaraja,
d. the development of the PABX (automatic centre) with 600 telephone connections in Nusa Dua,

Tabel / *Table III — 23*

PERKEMBANGAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA TAHUN 1975 S/D 1982
DEVELOPMENT OF AIR TRANSPORTATION TRAFFIC IN 1975 UNTIL 1982

TAHUN	INTERN/SIONAL	PESAWAT		PENUMPANG			BAGASI (KG)		BARANG (KG)		POS (KG)	
	Domestik	Datang *Arrivals*	Berangkat *Departures*	Datang *Arrivals*	Berangkat *Departures*	Transit	Dibongkar *Unloading*	Dimuat *Loading*	Dibongkar *Unloading*	Dimuat *Loading*	Dibongkar *Unloading*	Dimuat *Loading*
1975	INT	2933	2924	124847	130446	8613	1746893	2131747	373486	512376	99058	27820
	DOM	4146	4150	77642	73504	11441	1152964	1190825	143323	379063	24987	73719
1976	INT	2543	2580	134713	140682	15979	1895972	2181305	321734	471916	51387	19274
	DOM	5169	5185	130540	133298	15956	1927035	2110637	379615	688990	61914	97669
1977	INT	1025	1036	63982	58815	14294	1036844	1183741	55810	99712	863	3963
	DOM	7582	7544	225933	240000	31124	3516454	3954711	603095	1027079	77356	137389
1978	INT	965	986	65317	58123	15742	944011	1620612	77577	231439	4390	2842
	DOM	8885	8883	264349	290371	34831	3615597	4389171	709561	932860	115095	173532
1979	INT	947	899	74376	65010	15750	1227609	1305346	61584	243949	3577	2395
	DOM	8908	8955	281570	317847	38705	4344546	4881200	817111	1122049	86787	209834
1980	INT	756	762	119233	147698	28162	2043181	2712852	104337	599535	517	1212
	DOM	8861	8903	277830	278075	23813	4250018	4282038	997540	1296686	47278	675417
1981	INT	1382	1381	140637	131637	53915	3119575	5395183	1992162	664090	38454	22199
	DOM	9751	9755	320014	329317	47386	3833728	4656878	1694061	2052454	341775	264086
1982	INT	1523	1595	146100	149355	88466	3146713	8201749	669713	636588	44471	22074
	DOM	8240	8186	295815	291130	66849	3165835	4115771	1111844	1696369	353803	367332

c. Pembangunan sentral Otomat di Singaraja 2.000 SS,
d. Pembangunan sentral Otomat di Nusa Dua 600 SS,
e. Penyeberangan telepon umum untuk kota Denpasar,
f. Pelayanan baru untuk pedesaan/tempat-tempat yang belum terjangkau sambungan telepon dengan fasilitas sambungan telepon jarak jauh (STJJ) sampai kini telah terpasang 24 langganan.

Jumlah sambungan telepon sampai dengan tahun 1985 tercatat sebanyak 12.714 yang meliputi sambungan induk 10.996 dan sambungan cabang 1.718 dan mempunyai kapasitas 14.360.

Untuk pelayanan teleks peningkatannya secara kuantitatif ditandai dengan :

a. Pembangunan sentral Teleks Denpasar dengan sistem baru (TWK - 9) dan sekaligus perluasan kapasitasnya (dari kapasitas 80 SS menjadi 300 SS),
b. Para pelanggan teleks sudah dapat berhubungan langsung ke semua pemakai teleks di seluruh dunia dengan terlebih dahulu memutar kode area masing-masing negara.

Dalam hal pengiriman dan penerimaan telegram yang semula mempergunakan fasilitas morse ataupun ponogram, telah diganti dengan teleprinter dan sekaligus dimasukkan ke dalam jaringan Gentek. Dan kota-kota yang telah masuk dalam jaringan Gentek di Propinsi Bali adalah Denpasar (Kuta, Sanur, Tuban), Singaraja, Tabanan, Negara, Amlapura dan Gianyar.

Pada tahun 1983 di Denpasar dilaksanakan pelayanan baru yaitu FACSIMILE (jiplakan/reproduksi) yang dapat melayani pengiriman/penerimaan gambar/ijazah dan sebagainya ke ibu kota di seluruh Indonesia dalam waktu cepat/singkat. Dan dengan sarana Telegram dan Teleks ini komunikasi khususnya di Bali akan semakin lancar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta Negara-negara di dunia. Data potensi Telepon, Teleks dan Telegrap di Propinsi Bali selama Pelita III dapat dilihat pada Tabel III-24.

Sedangkan pemakai jasa telekomunikasi jenis pelayanan alur sewa pada umumnya adalah perusahaan besar, kantor-kantor pemerintah dan yang sejenisnya, yang menginginkan suatu hubungan langsung antara kantor induk dengan kantor cabangnya. Jenis pelayanannya adalah :

a). Tele data yang telah dimanfaatkan oleh GIA dan Antara,
b). Point to point Teleprinter/Telepon.

Dengan adanya peningkatan pembangunan Sentral Telepon, Teleks dan Telegrap maka pembangunan jaringan transmisi dalam Pelita III sudah pasti dapat meningkatkan produksi jasa Telepon. Lihat Tabel III-25.

e. spreading the public telephone exchanges widely in the city of Denpasar,
f. establishment of long-distance telephone exchange facilities (STJJ) in rural areas and in so far 24 subscriptions had been recorded.

Up to 1985 the total telephone exchanges were 12,714 consisting of 10,996 trunk lines and 1,718 branch lines and with a capacity of 14,360 telephone subscribers.

The quantitative increase of telex services had been done by :

a. establishment of the telex centre in Denpasar with a new system (TWK - 9) and at the same time expansion of telex capacity (from 80 telex subscribers to 300 subscribers),
b. Possibility of all telex subcribers to make direct communications with other subscribers in the whole world by means of direct dialing of the foreign country telex-code involved.

The old system of telegraphy using morse code and ponograms has been changed by teleprint system included its connection with the Gentex network. This network in the Province of Bali covers Denpasar (Kuta, Sanur, Tuban), Singaraja, Tabanan, Negara, Amlapura and Gianyar.

In 1983 the new FACSIMILE (copy/reproduction) service was established in Denpasar. This service has the capability to send and receive pictures/diplomas and other documents to all capital cities in Indonesia in a very short time. With this telegram and telex system in Bali, its communication with other regions in the country and other foreign countries will be smoother.

Data on Telegraph, Telephone and Telex potentials in Bali can be observed in Table III-24.

Another telecommunication service is the lease channel system which usually is used by big companies, government offices and others which prefer a direct link between their central offices and their branch-offices. This type of service covers :

a) Tele Data utilized by the Garuda Indonesia Airways and Antara news agency,
b) Point-to-Point Teleprinter/telephone links.

With the increase of Telegraph, Telephone and Telex centres the development of transmission network in Pelita III surely would be able to intensify the telephone service production. (See Table III-25).

Data show the continuous yearly increase of service consumers. To achieve a maximum service this increase will be serve with the increase/development of facilities.

The development/expansion programme of the telecommunication services in Repelita IV will cover :

a. establishment/spreading of new public telephone booths in cations like market places, entertainment and shopping centres, schools, business centres and other convenient places easy to be reached,

Tabel / *Table III — 24*

DATA POTENSI TELEPON, TELEK, TELEGRAP PROPINSI BALI
DATA OF TELEPHONE, TELEX AND TELEGRAPH IN THE PROVINCE OF BALI

Jenis Pelayanan / *Services*	1979	1980	1981	1982
1. Sentral Telepon / *Telephone centre*				
a. Otomat / *Automatic*	3	3	3	3
b. Manual / *Manual*	9	9	9	9
2. Kapasitas Sentral / *Subscriber capacity*				
a. Otomat / *Automatic*	5700	5700	5700	5700
b. Manual / *Manual*	2610	2610	2610	2950
3. Sambungan Induk / *Trunk lines*				
a. Otomat / *Automatic*	3413	4251	4990	5397
b. Manual / *Manual*	2062	2194	2288	2357
4. Sentral Telek / *Telex centre*	1	1	1	1
5. Kapasitas Telek / *Telex capacity*	80	300	300	300
6. Sambungan Induk / *Trunk lines*	68	103	143	163
7. Kantor Telegrap Telek *Telegraph and Telex Office*	1	1	1	1
8. Kantor Tgp. Pembantu *Telegraph Branch office*	2	2	2	2
9. Kantor Telepon/Telegrap *Telegraph and Telephone office*	1	1	1	1
10. Kantor Telepon/Tgp. Cabang *Telegraph and Telephone Branch office*	8	8	8	8

Tabel / *Table III — 25*

PRODUKSI JASA : TELEPON, TELEKS, TELEGRAM 1979-1982
TELEPHONE, TELEX AND TELEGRAPH SERVICES IN 1979 - 1982

Jenis Pelayanan / *Services*	1979	1980	1981	1982
Jasa Telepon / *Telephone service*				
1. Pulsa lokal & SLJJ *Local & long distance pulse*	43.264.147	56.017.863	68.231.635	76.250.500
2. Interlokal Manual *Trunk call manual service*				
- Percakapan/ *Conservation*	253.868	255.492	268.657	297.789
- M e n i t / *Minute*	1.937.359	2.538.102	1.192.568	2.309.211
3. Internasional/ *International*				
- Percakapan/ *Conservation*	22.835	23.966	30.758	39.801
- M e n i t / *Minute*	117.750	134.867	179.596	193.588
Jasa Telek / *Telex service*				
1. Pulsa Telek *Telex pulse*	1.339.674	2.769.989	5.121.886	5.106.970
2. Internasional/ *International*				
- Percakapan/ *Conservation*	27.988	33.807	16.449	42.746
- M e n i t / *Minute*	60.840	74.276	100.728	90.828
Jaso Telegrap / *Telegraph service*				
1. Telegrap Dalam Negeri *Domestic telegraph*				
- Telegram	92.313	115.271	123.376	130.282
- K o t a / *Town*	3.100.535	3.756.234	3.757.768	3.758.819
2. Telegram Luar Negeri *International telegraph*				
- Telegram / *Telegram*	9.822	11.151	10.332	10.784
- K o t a / *Town*	211.391	211.776	229.879	229.750

Dari data tersebut dapat dilihat pemakai jasa terus meningkat tiap tahunnya, peningkatan ini akan tetap diimbangi dengan adanya peningkatan/pembangunan fasilitas, agar diperoleh suatu pelayanan yang maksimal. Dan dalam Repelita IV program pembangunan/pengembangan Jasa Telekomunikasi adalah berupa :

a. penambahan/penyebaran telepon umum pada tempat-tempat seperti pasar, tempat hiburan, tempat perbelanjaan, sekolah, pusat perkantoran dan tempat-tempat lainnya yang mudah dicapai pada saat diperlukan.
b. perluasan STO di Sanur, pembangunan STO di Tabanan, Gianyar, Klungkung,
c. Pembangunan stasium bumi kecil di Negara, Amlapura, Nusa Penida dan Celukan Bawang,
d. pemasangan jaringan telepon ke kantor Camat yang sampai saat ini belum ada teleponnya.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan jasa Pos dan Giro selama Pelita III di Propinsi Bali telah dibangun sebanyak 14 buah Kantor Pos Pembantu dengan sarana penunjang berupa 1 buah truk, 14 buah sepeda motor dan 15 buah bis surat. Lihat Tabel III-26.

b. Expansion of the STO (Sentral Telepon Otomat = PABX) in Sanur, establishment of new PABX centres in Tabanan, Gianyar and Klungkung,
c. establishment of small sattelite ground stations in Negara, Amlapura, Nusa Penida and Celukan Bawang,
d. installation of telephone networks to the sub-district offices which are not yet connected with the PABX centre.

In the efforts to increase the Post and Giro public services, 14 auxiliary offices had been established during Pelita III in the Province of Bali, including some supporting facilities like 1 truck vehicle, 14 motor cycles and 15 post boxes. (See Table III-26).

Tabel / *Table III — 26*

PEMBANGUNAN KANTOR POS DAN SARANA PENUNJANG TAHUN 1978/1979 - 1982/1983
ESTABLISHMENT OF POST OFFICES AND ITS SUPPORTING FACILITIES IN 1978/1979 — 1982/1983

No.	Uraian *Description*	Satuan *Units*	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83
1.	Pembangunan Kp/Kpp/Kptb 1) *Establishment*	gedung *Building*	3	1	3	3	4
2.	Pembangunan Kpb/Ix) *Establishment*	gedung *Building*	—	—	—	—	—
3.	Pembangunan Biro Daerah Pos *Establishment of Regional Bureau of Post*	gedung *Building*	—	—	—	—	—
4.	Pembangunan Sentral Giro *Establishment of Giro Centre*	gedung *Building*	—	—	—	—	—
5.	Pos Keliling dan Angkutan lokal *Mobile post office and local transportation*						
	- Kendaraan Pos *Post vehicles*	buah *units*	—	1	—	—	—
	- Sepeda motor *Motorcycles*	buah *units*	4	2	4	4	—
6.	Bis Surat *Post box*	Kotak	—	5	5	5	—

Keterangan / ***Remarks :***
1) Kp = Kantor Pos / ***Post Office***
Kpp = Kantor Pos Pembantu / ***Auxiliary Post Office***
Kptb = Kantor Pos Tambahan / ***Additional Post Office***
x) Kpb/I = Kantor Pos Besar/Kelas I / ***Ist Class/Post Head Office***

In line with the increase of Post services facilities, the public services of the Post and Giro office in the Province of Bali has increased continuously by the years. The biggest problem is to get land for the location of new Post offices, beside the uncorrect names of streets and numbers of the houses/buildings which often delayed the process of sending Post materials or the process of Post public services.

Because of those problems new Post and Giro offices will be located in the Sub-district offices in the period of Repelita IV, so that every sub-district in the Province of Bali can make use of this facility.

To increase the speed of postal traffic the post code in Indonesia will be introduced. In Bali this program will be started from Denpasar.

The auxiliary post offices are located in :
a. Tabanan, Denpasar (Airport) and Tejakula
b. Penebel
c. Kediri, Kubu and Mengwi,
d. Bebandem, Baturiti and Kesiman,
e. Busungbiu, Grokgak, Sukawati and Pekutatan.

6. Tourism

The island of Bali with its beauty and unique tradition has made profit of its potentials like the beauty of the landscape, the cultural art, the quiet and orderly way of living, to make Bali an interesting object for tourists in the form of cultural tourism.

In other words there are some objects which make tourists go to Bali, i.e.
a. Its unique cultural orientation to the Hindu religion, its preahistorical relics, the ancient Bali culture with the "Tri Murti" (Holy Trinity) as the basic conception.
b. The natural beauty of its landscape which causes Bali to be called "Nusa Ning Nusa" and "Puncakening Geli" by the late Gajah Mada in 1343

Kantor Pos Pembantu dimaksud berada :
a) 3 buah masing-masing di Tabanan, Denpasar (Airport) dan Tejakula,
b) 1 buah di Penebel,
c) 3 buah masing-masing di Kediri, Kubu tambahan dan Mengwi,
d) 3 buah masing-masing di Bebandem, Baturiti dan Kesiman,
e) 4 buah masing-masing di Busungbiu, Grokgak, Sukawati dan Pekutatan.

Sejalan dengan adanya peningkatan fasilitas pelayanan Pos tersebut maka produksi jasa Pos dan Giro di Propinsi Bali dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun masalah yang dihadapi adalah masih sulitnya mendapatkan lokasi tanah yang sesuai untuk pembangunan Kantor Pos Pembantu bis-bis surat, disamping belum sempurnanya nama-nama jalan dan nomor rumah/bangunan yang dapat memperlambat proses penyampaian jasa Pos tersebut. Oleh karenanya dalam tahap Repelita IV diadakan Kantor Pos dan Giro Pembantu di Kecamatan-kecamatan, sehingga seluruh Propinsi Propinsi Bali tiap Kecamatannya memiliki minimal sebuah Kantor Pos dan Giro Pembantu. Dan juga memperkenalkan kepada masyarakat mengenai pemakaian kode pos Indonesia untuk mempercepat penyampaian surat, program ini akan dimulai di Denpasar.

6. Pariwisata

Pulau Bali dengan keindahan serta keunikannya telah memanfaatkan potensinya berupa keindahan alam, seni budaya, tata kehidupan tradisional yang tenang dan aman, benar benar dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang dipolakan dalam bentuk pariwisata budaya. Dengan perkataan lain ada beberapa hal yang menyebabkan wisatawan berkunjung ke Bali, yakni :

a. Keunikan kebudayaannya yang berorientasi kepada agama Hindu, peninggalan-peninggalan pra sejarah, kebudayaan Bali kuno dengan konsepsi dasarnya adalah "Tri Murti".
b. Keindahan alam yang alamiah, dengan adanya kenyataan inilah Pulau Bali diberi julukan "Nusa Ning Nusa" dan "Puncakening Geli" oleh Gajah Mada pada tahun 1343 dan juga julukan "Youck Hollands" dari Cornelis de Houtman yang mengunjungi Pulau Bali pada tahun 1597.

Pulau Bali mulai dikenal oleh dunia internasional setelah pemerintahan Belanda mendatangkan orang-orang ahli untuk mendalami serta menulis aspek-aspek kehidupan rakyat Bali, seperti agama, seni budaya, kesusasteraan, adat istiadat, pertanian dan keindahan alamnya.

Sekitar tahun 1920 dapat dianggap sebagai titik permulaan datangnya orang-orang Barat sebagai wisatawan ke Bali yang diselenggarakan oleh perusahaan pelayaran Belanda KPM yang menyinggahi Pulau Bali secara periodik. KPM pertama-tama mendirikan tempat penginapan di Kintamani dan kemudian Bali Hotel. Mulailah wisatawan membeli benda-benda budaya yang merangsang para seniman untuk membuat patung-patung dengan maksud dijual kepada wisatawan. Dengan keadaan demikian itu nampaknya Belanda mempunyai minat untuk menjadikan Pulau Bali sebagai suatu "Musium Hindu", dalam artian tidak mengizinkan terjadi modernisasi secara besar-besaran dan ingin tetap mempertahankan kelangsungan hidup tradisional yang unik di Pulau Bali ini.

Kemudian sekitar tahun 1930 kesenian Bali melawat ke luar negeri (Belanda dan Prancis) yang dapat dianggap sebagai pengenalan untuk pertama kalinya dan mendapat sambutan. Kemudian tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang, arus wisatawan ke Bali terhenti akibat Perang Dunia II sampai adanya pengakuan kedaulatan tahun 1949.

Tahun 1950 kepariwisataan di Bali hidup/berjalan kembali, walaupun dalam arti yang relatif kecil. Kosongnya wisatawan itu berlangsung terus sampai tahun 1965, karena pada masa itu Indonesia banyak mengalami gangguan keamanan dalam negeri.

Mulai tahun 1966 sampai tahun 1968 kepariwisataan di Pulau Bali berjalan baik dan meningkat, karena adanya pertumbuhan prasarana-prasarana yang lebih mantap dan juga dengan dibukanya Bali Beach Hotel di Sanur pada tahun 1966. Disamping itu dengan dibukanya lapangan udara internasional Ngurah Rai pada tahun yang bersamaan, dapat dikatakan bahwa Pulau Bali benar-benar dibuka lebar-lebar untuk wisatawan asing dan dijadikan sebagai Pusat Pengembangan Pariwisata Indonesia Bagian Tengah.

Sektor pariwisata tetap merupakan tumpuan harapan Pemda Tk I Bali dan bahkan pemerintah Indonesia sebagai sumber devisa negara dan penyediaan lapangan kerja yang cukup potensial. Kemajuan kepariwisataan di daerah Bali diharapkan membawa dampak yang luas terhadap kehidupan perekonomian daerah dan melalui industri pariwisata banyak lapangan usaha yang dapat dikembangkan, misalnya saja di sektor Perdagangan, Hotel, Restoran, sektor Industri (termasuk di dalamnya kerajinan rumah tangga), Pengangkutan dan Komunikasi, Pertanian Jasa dan lain sebagainya.

and also "Youck Hollands" by Cornelis de Houtman who had visited the island in 1597.

Bali became wellknown in the world since the Dutch Government sent its scientists to this island to make a study and to write about the population living aspects in Bali like their religion, cultural art, literature, tradition, agriculture and the beauty of the nature.

Around 1920 could be assumed as the beginning of the tourist flow from the West which was organized by the Royal Dutch Shipping Company (KPM) which made a regular stop on this island. At first the KMP established a bungalow in Tampaksiring and later on Hotel Bali. The tourists begun to purchase cultural goods which motivated the artists to make scluptures with the aim to sell them. It seemed that the Dutch liked to make Bali as a "Hindu Museum" in the sense that it would not allow big modernization and liked to maintain the unique traditional way of living in the island of Bali.

Later on in 1930 the Balinese art was intriduced in a foreign country (the Netherlands and France) for the first time which was highly appreciated. In 1942 during the Japanese occupation and the World War II there was no tourists until (the recognition of Indonesian Sovereignty in 1949.

In 1950 a small number of tourists had visited Bali again. This situation continued until 1965 because in those period Indonesia suffered from domestic disorders.

From 1966 until 1968 tourism had increased and made progress because of the growth of better facilities and the opening of the new Bali Beach Hotel in Sanur in 1966. In the same year the international airport Ngurah Rai was opened and this meant that the island of Bali was really opened for foreign tourists and Bali was formed into the Centre of Tourists Development in the central part of Indonesia.

The tourism sector is the support of hope to obtain foreign exchange and employment opportunities for the Province of Bali as well as the Government of Indonesia. The progress of tourism in Bali has been planned to have a broad impact upon the economy in the region of business, for example in the sectors of Trade, Hotel, Restaurant, Industry (including home handicraft industry), transportation and communication, agriculture and other services.

All those sectors mentioned above have to be coordinated to guarantee the success of tourism since its identity will surely be influenced by a weakness in management of any sector.

From this point of view of development and increase of tourism in Bali have to receive special attention, for instance to know the taste of tourists. This then will involve facilities for the tourists. It consists not only of public services like seats in the airplanes, hotel rooms, opportunities to lay down on the beach, but must form a parcel of complete experiences during their trip in Bali.

The tourist production elements consists of the attraction of the object, facilities in the object location and the accessibility of the object region, whereas the attraction of tourists object is a product element which causes the tourists to decide their choice. So they may prefer a certain object region.

The tourist centres in Bali are spread in different regions, such as :

1. *Kuta in the South of the city of Denpasar near the international airport Ngurah Rai. This place is very famous because of its beautiful beach and because it is suitable for swimming and surfing. The hotels in this region are also cheap.*
2. *Sanur in South-East of Denpasar. It has a beautiful and quiet beach and many international hotels (about 12 hotels).*
3. *Nusa Dua in South East of the international airport Ngurah Rai. This location has also a beautiful and quiet beach with international hotels (about 5 hotels)*
4. *Ubud is famous as the centre of painting and sclupture art made from wood. In this place there is a Painting Museum with a collection of high quality paintings.*
5. *Tampaksiring is wellkown because of its holy water source "Tirta Empul" and the Palace of the late President Sukarno.*
6. *Penelokan is famous because of the beautiful landscape with the Gunung Agung and its surrounding lake.*
7. *Besakih is the most holy Pura (the holy shrine) since hunderds of years and is the main temple in Bali. It is also called : "mother of Temple".*
8. *Sangeh is in the most Northern part of the district of Badung. It is famous of the many tame monkeys which consist of 3 groups : the West, the Central and the East groups.*

There are still more tourists objects in Bali.

Up till now the increasing number of tourists proves the tourists potential in Bali. Data from the Statistics Office of Bali in 1985 show us that 83,40% of the tourists from big countries came to Bali for holidays. Visitors as full (100%) tourists came from Australia, Belgium, China, Finland, South Korea, Malaysia, Norway, Switzerland, Thailand, Greece (Table III-27).

This data only shows tourists who came straight to Bali from their respective countries. Other visitors who disembarked in other harbours or airports in Indonesia were not registered here because the lack of data.

Untuk mencapai kesuksesan serta kemantapan dalam bidang pariwisata ini, maka semua sektor tersebut, perlu dilibatkan secara bersama-sama, karena jika salah satunya lemah akan mempengaruhi identitas pariwisata itu sendiri secara keseluruhan.

Bertolak dari pemikiran demikian maka masalah pengembangan dan peningkatan sektor pariwisata di Bali memerlukan perhatian yang khusus misalnya, pengetahuan selera wisatawan. Berbicara mengenai selera wisatawan sebagai konsumen akan erat hubungannya dengan produk wisata, yang tidak hanya terdiri dari jasa yang dihasilkan tempat duduk pesawat udara, tempat tidur hotel atau bermalasan di tepi pantai, akan tetapi merupakan paket dari semua pengalaman selama mengadakan perjalanan tersebut.

Unsur-unsur produk wisata terdiri dari daya tarik tujuan, fasilitas daerah tujuan dan aksessibilitas daerah tujuan wisata, sedangkan daya tarik tujuan wisata merupakan unsur dari produk yang menyebabkan para wisatawan memilih daerah tujuan tersebut. Dibandingkan dengan daerah tujuan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pusat kunjungan wisatawan di Bali terdapat di beberapa daerah sebagai berikut :

1. Kuta yang terletak di bagian selatan Kota Denpasar, dekat Airport Nugrah Rai. Tempat ini sangat terkenal karena pantainya yang indah dan sesuai untuk berenang serta surfing, juga hotel-hotelnya yang murah.
2. Sanur terletak di sebelah Tenggara Denpasar, dengan pantainya yang indah dan tenang juga banyak berdirinya hotel-hotel yang bertaraf internasional (ada 12 buah),
3. Nusa Dua yang terletak di sebelah tenggara Bandara Ngurah Rai. Tempat ini pun terkenal dengan pantainya yang indah dan tenang, juga banyak berdiri hotel-hotel yang bertaraf internasional (sekitar 5 buah),
4. Ubud, dikenal sebagai pusat lukisan dan ukir-ukiran dari kayu. Di sini terdapat Musium Lukisan yang menyimpan hasil-hasil seni lukisan yang bermutu,
5. Tampaksiring, yakni tempat yang terkenal dengan sumber air yang suci : Tirta Empul dan Istana bekas Presiden Soekarno,
6. Penelokan, termashur karena pemandangannya yang indah dengan Gunung Batur yang dikelilingi danaunya,
7. Besakih, yakni Pura yang paling disucikan di Pulau Bali telah ratusan tahun dan merupakan pusatnya Pura di Bali atau disebut dengan istilah "Mother of Temple".
8. Sangeh, yang terletak di ujung Utara Kabupaten Badung, yang terkenal dengan banyak keranya yang sangat jinak, yang terbagi atas 3 kelompok yaitu : kelompok Barat, kelompok Tengah dan kelompok Timur.

   Dan masih banyak lagi tempat-tempat yang dijadikan obyek wisata di Bali.

Gambaran mengenai dorongan kunjungna ke Bali selama ini sungguh sangat meyakinkan akan potensi wisata Bali. Dari data yang diperoleh dari Kantor Statistik Bali tahun 1985 diketahui umumnya turis yang berasal dari negara besar (83,40%) mempunyai tujuan utama untuk berlibur. Yang tercatat 100% untuk berlibur berasal dari : Negara seperti Australia, Belgia, China, Finlandia, Korea Selatan, Malaysia, Norwegia, Swiss, Thailand, Yunani. Lihat Tabel III-27

Para wisatawan yang datang ke Pulau Bali ini terdiri dari berbagai negara dan kunjungannya ke Bali setiap tahunnya yang dapat diikuti perkembangannya hanyalah wisatawan yang datang langsung dari luar negeri ke Bali. Sedangkan yang datang ke Bali melalui pintu gerbang lainnya di Indonesia belum dapat diikuti perkembangannya karena sulit untuk mendapat datanya. Dan ditinjau dari segi kebanggsaannya, maka yang paling banyak mengunjungi pulau Bali adalah wisatawan asing berkebangsaan Australia dan yang lainnya adalah wisatawan asing berkebangsaan Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Italia dan Negara-negara lainnya.

Pada tahun 1983 jumlah wisatawan yang langsung datang dari negaranya sekitar 166.575 orang, kemudian tahun 1984 meningkat sebesar 13,36% yakni sebanyak 188.833 orang dan pada tahun 1985 sebanyak 211.222 orang.

Lamanya tinggal para wisatawan asing dan domestik di Bali ratarata mencapai 5-6 hari, dengan perincian rata-rata 6-7 hari bagi wisatawan asing dan 4-5 hari hari untuk wisatawan Indonesia (domestik). Jika dilihat dari segi prosentase lamanya wisatawan yang tinggal di Bali, 3-5 hari ada sebanyak 42,10%, kemudian 6-10 hari 28,87%, 1-2 hari 15,50%, 11-15 hari 8,53%, dan sisanya tinggal di Bali selama 16-30 hari sekitar 5%.

Diantara para wisatawan yang berkunjung ke Bali tidak semuanya datang untuk pertama kali, tetapi ada juga yang datang sudah beberapa kali. Jika dilihat dari frekuensi kedatangannya, ternyata ada kira-kira 57% yang datang untuk pertama kali.

Tabel / *Table III — 27*

PERSENTASE WISATAWAN MENURUT KEBANGSAAN DAN TUJUAN UTAMA MENGUNJUNGI BALI

PERCENTAGE OF TOURISTS IN BALI, THEIR NATIONALITY AND AIM OF VISITS

Kebangsaan / *Nationality*	Tujuan Utama Mengunjungi Bali / *Main Aim at Visit*: Berlibur / *Holiday*	Usaha / *Business*	Kunjungan Keluarga / *Family visit*	Dinas / *Duty*	Lainnya / *Others*	Jumlah / *Total*
1. Indonesia	66,08	7,91	14,31	6,79	5,09	100,00
2. Australia	97.05	0,40	1,74	0,00	0,81	100,00
3. Amerika Serikat *U.S.A*	97,12	2,33	0,41	0,14	0,00	100,00
4. Austria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5. Belanda *the Netherlands*	91,89	1,80	4,50	0,00	1,80	100,00
6. Belgia *Belgium*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7. China	100,00	0.00	0,00	0,00	0,00	100,00
8. Finlandia *Finland*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9. Inggris *Great Britain*	95,48	1,19	0,00	0,00	3,33	100,00
10. India	88,89	11,11	0,00	0,00	0,00	100,00
11. Jepang *Japan*	94,98	1,85	0,13	1,72	1,32	100,00
12. Jerman *Germany*	89,09	4,55	0,00	4,55	1,82	100,00
13. Korea Selatan *South Korea*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14. Kanada *Canada*	98,00	0,00	0.00	1,00	1,00	100,00
15. Malaysia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16. Norwegia *Norway*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17. Philipina *the Phillipines*	90,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00
18. Italia	98,12	0,00	0,00	0,00	1,88	100,00
19. Prancis *France*	97,73	0,76	1,52	0,00	0,00	100,00
20. Singapura *Singapore*	97,56	0,00	0,00	1,22	1,22	100,00
21. Swedia *Sweden*	97,87	0,00	2,13	0,00	0,00	100,00
22. Swiss *Switzerland*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23. Spanyol *Spain*	81,82	0,00	0,00	0,00	18,18	100,00
24. Thailand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25. Yunani *Greece*	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
26. New Zeland *New Zealand*	89,62	1,89	1,89	0,00	6,60	100,00
27. Lainnya *Others*	93,88	0,00	0,00	2,04	4,08	100,00
Jumlah / *Total*	83,40	4,10	6,37	3,20	2,94	100,00

Most tourists came from Australia. Tourists with other nationalities are the Japanese, the Englishmen, the American, the Italian and other nationalities.

In 1983 the numbers of tourists who came directly to Bali from their respective countries were about 166,575 persons and in 1984 in increased by 13,36% or 188,833 persons and in 1985 it was 211,222 persons.

Most of the foreign and domestic tourists stayed in Bali about 5-6 days, i.e. the foreigners 6-7 days and the domestic tourists 4-5 days. From the percentage point of view, the number of tourists who had stayed 3-5 days in Bali was 42,10%, 6-10 days 28,8%, 1-2 days 15,50%, 11-15 days 8,53% and the remainder had stayed 16-30 days about 5%.

Not all of the tourists had visited Bali for the first time. Only 57% of them were new visitors.

With the increase of foreign and domestic tourists in Bali it is necessary to have more sufficient facilities, among other things hotels/accomodations, i.e. International Hotels (berbintang) and domestic hotels (non-bintang) like lodging, lodging houses, home stay and others.

All the international hotels are located in the district of Badung. Up to 1985 there were 25 hotels spread in 3 locations; in Sanur, Kuta and Denpasar. The total hotel rooms of all the 25 hotels was 3,065 rooms.

During 1985 there were 223,304 foreign and 86,087 domestic hotel guests in Bali. The total number were 309,391 persons. From the observation of

ıeningkatnya kunjungan wisatawan asing maupun domes- ḷali ini, maka perlu adanya fasilitas-fasilitas yang memadai, ıntaranya adalah Hotel/akomodasi yang dibedakan men- ı., yaitu Hotel Berbintang dan Non Bintang/akomodasi m arti Rumah Penginapan biasa seperti Losmen, Home ı sebagainya.

›intang semuanya berlokasi di Kabupaten Badung dengan hnya sampai dengan tahun 1985 sebanyak 25 hotel dengan li 3 lokasi, yakni di Sanur, Kuta dan di Denpasar. Jumlah ersedia dari 25 buah hotel tersebut, adalah sebanyak 3.065

hun 1985 jumlah tamu yang datang pada hotel berbintang '.391 orang terdiri dari tamu asing sebanyak 223.304 orang mestik sebanyak 86.087 orang, bila dilihat dari perkem- ı yang datang setiap bulanya, maka pada bulan Agustus, ı Desember merupakan bulan yang paling ramai dikun- van, dengan jumlah pengunjung berkisar antara 25.090 :5 orang.

ɔrosentase tingkat penghunian kamar pada hotel berbin- -rata dari kelima kelas tersebut, mencapai 52,6% (1985), tahun sebelumnya dapat mencapai 54,2% (1984), berarti ıunian kamar hotel berbintang mengalami penurunan se- emudian mengenai prosentase tingkat penghunian tempat ɔtel berbintang ini rata-rata mencapai 52,5%, juga terjadi ekitar 2,4% (tahun 1984) mencapai 54,9%.

lengan hotel berbintang yang jumlahnya hanya sekitar 25 hotel non-bintang/akomodasi lainnya secara keseluruhan 3 buah yang dibagi atas beberapa kelompok berdasarkan ırnya, yakni ada kelompok kamar kurang dari 10 kamar elompok kamar 10-24 (215 buah); kelompok kamar 25-40 n kelompok kamar 41 ke atas sebanyak 15 buah hotel. 32 hotel non-bintang ini hampir 50% lebih terdapat di ıadung (274 buah), kemudian Kabupaten Gianyar (116 paten Buleleng 44 buah dan di Kabupaten Karangasem buah, sisanya tersebar di 4 Kabupaten lainnya di Bali. lah kamar yang tersedia pada hotel non-bintang ini dalam ıdalah sebanyak 6.337 buah dengan jumlah tempat tidur .220 buah.

ına halnya dengan hotel berbintang, maka pada hotel non- pada tahun 1985 mengalami penurunan pula.

ilitas hotel bagi wisawatan tersebut, juga ada jasa-jasa ıriwisata lainnya seperti Angkutan wisata, tempat hiburan oran.

layani perjalanan wisatawan khususnya wisatawan asing jung ke Bali pada umumnya perjalanan wisatawan di- Travel Biro/Biro perjalanan yang meliputi Biro perjalanan ıng Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan Umum. ılanan yang beroperasi di Bali seluruhnya dalam tahun ak 28 buah perusahaan yang kesemuanya berlokasi di ɔinsi atau tepatnya di Kabupaten Badung, dengan lokasi aitu Denpasar, Sanur dan Kuta. Perkembangan perusahaan Bali, dapat dilihat dalam Tabel III-28.

n jumlah armada yang dioperasikan sebanyak 161 buah h Mini Bus dan 397 buah Taxi/Jeep. Jumlah armada ini kin meningkat dibandingkan dengan tahun 1980. Tenaga dari 28 buah perusahaan tersebut adalah sebanyak 517 Tabel III-29.

ı penunjang pariwisata yang tidak kalah pentingnya adalah at hiburan, dimana para wisatawan dapat menikmati seni ıan daerah yang bersangkutan dan obyek-obyek wisatanya. ıran dimaksud dibedakan menjadi : kesenian pentas, bios- ıseum serta obyek wisata.

ıt kesenian pentas pada umumnya dipertunjukkan tari- onal, misalnya tari Barong, Kecak, Ket, Legong, Sendratari, againya. Kesenian ini hanya terdapat di Kabupaten Badung ten Gianyar, yang dalam pementasannya selama tahun menyerap sekitar 124.101 orang. Disamping panggung lung bioskop juga merupakan salah satu tempat hiburan . dengan tahun 1985 di Propinsi Bali terdapat sekitar 39 ; bioskop yang tersebar di 8 Kabupaten dengan kapasitas ık berjumlah 23.382 kursi. Dalam pemutaran film selama tersebut, dapat menyerap penonton sebanyak 1.801.742 n hasil yang diperoleh dari penjualan karcis sebanyak Rp 0,-.

Museum yang ada di daerah Bali sampai saat ini berjumlah ›byek wisata yang telah diinventarisasi berjumlah 130 buah

ın mengenai restoran/rumah makan yang terdapat di Pro- lama tahun 1984/85 sebanyak 715 buah, yang lokasinya

the monthly tourists arrivals, in was found that the months of August, October and December were the busiest with a total of about 25,000 to 31,025 visitors per month.

The rate of room occupancy in the international hotels (all 5 classes) had reached an average of 52,6% (1985) but one year before it was 54,2% (1984). This meant that the decrease of room occupancy was about 1,6% in those "star" hotels.

Beside the 25 international hotels (1985), there were 523 other domestic hotels/lodgings which were divided into several groups based on the total rooms they had. So one group consisted of hotels with less than 10 rooms (258 units), a second group with 10-24 rooms (215 units) the third group with 25-40 rooms (35 units) and the last group with 41 rooms or more (15 units).

From this 523 non-star hotels nearly 50% were located in the District of Badung (274 units), followed by the District of Gianyar (116 units), District of Buleleng (44 units), District of Karangasem (39 units) and the rest in the 4 remaining Districts of Bali. The total rooms of this kind of hotels in 1985 was 6,337 units with 12,220 beds.

In 1985 the total number of hotel guests had decreased too; the same had happened with the international hotels.

Beside hotel facilities there were other services to support tourism, such as tourists transportation, entertainment spots or restaurants.

Generally tourists, in particular the foreign tourists, who liked to see Bali would be handled by travel bureaus which usually consist of public travel bureaus, branch offices and travel agents. In 1985 there were in Bali 28 operating travel bureaus, all of them located in the capital city of Denpasar in the District of Badung with 3 locations in Denpasar, Sanur and Kuta. The development of transportation companies in Bali can be seen in Table III-28.

The number of vehicles in operation were 161 buses, 115 mini-buses and 397 taxis/jeeps. In comparison with 1980 this number had increased in 1985. (See Table III-29).

Tabel / *Table III — 28*

JUMLAH PERKEMBANGAN PERUSAHAAN ANGKUTAN DI BALI
NUMBER OF TRANSPORTATION COMPANIES IN BALI

No.	Tahun *Year*	Jumlah *Total*
1.	1980	22 buah / *units*
2.	1981	25 buah / *units*
3.	1982	21 buah / *units*
4.	1983	24 buah / *units*
5.	1984	24 buah / *units*
6.	1985	28 buah / *units*

Sumber : Diparda Tk. I Bali.
Source : Regional Tourism Office - Bali.

Tabel / *Table III — 29*

TRANSPORTASI/PERKEMBANGAN USAHA ANGKUTAN WISATA DI BALI
DEVELOPMENT OF TOURIST TRANSPORTATION IN BALI

No.	Jenisnya *Type*	Jumlah seats / *Total sets*					
		1980	1981	1982	1983	1984	1985
1.	Bus	149	119	155*	137	137	161
2.	Mini Bus	50	87	66	93	93	115
3.	Taxi/Jeep	31	49	385	391	391	397

Sumber : Diparda Tk. I Bali
Source : Regional Tourism Office - Bali.

The amount of tourists guides of this 28 travel bureaus was 517 persons.

Another important object to support the flow of tourists is the entertainment places in which the visitors can enjoy the art and culture of a certain region, including its tourists objects. This entertainment spots consist of art performance stages, film theatres, museums and tourists objects.

The performance to be held on those stages consists usually of traditional dance like the Barong, Kecak, Ket, Legong, Sendratari, Arja and other dances. This kind of dances can only be found in the Districts of Badung and Gianyar. In the performance in 1985 it had an audience of 124,101 visitors. Beside those art stages up to 1985 there were in the Province of Bali 39 movie theatre buildings spread in 8 districts with a capacity of 23,382 seats. In 1985 a total of 1,801,742 film spectators was recorded with a total income of Rp1,106,872,000,- from ticket sales.

tersebar di seluruh wilayah antara lain ada di dalam hotel ataupun di kawasan perhotelan seperti Sanur, Kuta, Kota Denpasar dan lainnya serta di dekat obyek-obyek wisata. Lihat Tabel III-30.

Dengan masuknya wisatawan (asing dan domestik) ke Pulau Bali maka dengan sendirinya bagi wisatawan itu sendiri terjadi pengeluaran, yang dapat dilihat dari seluruh wisatawan yang datang ke Bali.

Wisatawan yang berkunjung ke Bali pada tahun 1983 sebanyak 611.772 orang, sedangkan pengeluaran rata-rata wisatawan per orang adalah Rp 442.166,00 (asing) dan Rp 112.090.00 (domestik). Dengan demikian jumlah pengeluaran seluruh wisatawan yang berkunjung ke Bali pada tahun tersebut adalah sejumlah Rp 171.558.820,00, dengan perincian Rp 137.957.560.700,00 untuk wisatawan asing dan Rp 33.600.995.120,00 untuk wisatawan domestik. Dengan anggapan jumlah pengeluaran wisatawan tersebut, merupakan output sektor pariwisata dan ratio biaya masing-masing sektor yang terkait langsung dengan sektor pariwisata sama dengan ratio biaya antara sektor-sektor pembentuk PDRB, maka nilai tambah bruto sektor pariwisata diperkirakan sebesar Rp 393,23 milyar, atau 10,3% dari PDBR Bali tahun 1983. Sedangkan wisatawan yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per kebangsaan, yang tertinggi adalah wisatawan Jepang dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebesar Rp 759.390,-. Dan sesuai dengan karakteristik wisatawan Jepang yang lebih senang datang secara rombongan, maka jenis pengeluarannya yang paling besar adalah untuk paket tour (53,58%) dan pengeluaran yang paling kecil adalah untuk pengapalan barang (sekitar 0,02%).

Demikian pula halnya dengan wisatawan domestik, pengeluaran yang paling besar adalah untuk paket tour (24,96%), sedangkan bagi yang datang tidak secara rombongan, pengeluaran yang paling besar adalah untuk penginapan (16,53%), oleh-oleh (12,53%), makanan dan minuman (12,22%), transport lokal (7,37%) dan sebagainya. Pengeluaran yang paling kecil adalah untuk penukaran uang, yaitu sebesar 0,02%.

Jadi peranan sektor pariwisata terhadap nilai PDRB Propinsi Bali sebesar 10,3% adalah terdiri dari : pertanian (0,12%), industri (1,02%), perdagangan, hotel dan restoran (3,12%), pengangkutan dan komunikasi (4,20%), perbankan dan keuangan lainnya (0,06%) dan pemerintahan dan jasa-jasa sebesar 1,78%.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang peranan sektor ini akan lebih meningkat lagi, karena dengan adanya kemudahan-kemudahan berupa penerbangan langsung dari luar negeri ke Pulau Bali meliputi Los Angeles, Honolulu, Guam, Hongkong, Malaysia, Jepang, Singapura dan Australia, akan menambah jumlah wisatawan asing yang datang ke daerah tersebut.

7. Perdagangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan sektor perdagangan adalah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat daerah Bali dengan lebih menekankan pada usaha pemerataan pembangunan, sehingga terwujud suatu pengadaan bahan-bahan keperluan pokok masyarakat maupun keperluan produksi yang lancar dengan harga yang wajar. Disamping itu diusahakan pula sasaran hasil-hasil produksi baik di dalam maupun di luar negeri dapat semakin diperluas.

Kegiatan perdagangan di Dati I Bali pada mulanya cenderung terpusat di kota besar saja, seperti di Singaraja dan Denpasar. Tetapi dalam Pelita III kegiatan tersebut telah menyebar secara lebih merata ke kota-kota kabupaten yang lainnya, karena semakin lancarnya arus lalu lintas barang di daerah Bali, adanya prasarana jalan dan sarana angkutan yang cukup memadai. Selain itu dibangun pula dua buah kantor perdagangan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, masing-masing di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung, juga bertambahnya prasarana pasar, baik pasar Inpres maupun pusat pertokoan di kota-kota kabupaten. Perkembangan sektor perdagangan dalam periode Pelita III ditandai dengan adanya beberapa hal, antara lain :

a. pengadaan dan pengeluaran barang keperluan pokok dan keperluan produksi yang berlangsung cukup lancar dengan harga yang wajar,
b. bertambahnya sarana penunjang seperti fasilitas perpasaran, dimana telah dibangun pasar-pasar umum dengan dana Inpres sebanyak 17 buah pasar yang dapat menampung ± 3.846 orang pedagang,
c. Adanya peningkatan hasil-hasil produksi pertanian disertai dengan pengembangan komoditi baru seperti cengkeh, panili, ikan hias dan rumput yang merupakan penunjang bagi peningkatan ekspor daerah Bali,
d. Jumlah pedagang yang memiliki SIUP menunjukkan kenaikan sebesar 107.20%, yaitu periode akhir Pelita II tercatat sebanyak 7,454 perusahaan dan pada tahun 1983 tercatat sebanyak 15.441 perusahaan,
e. Guna menunjang usaha-usaha peningkatan kualitas pengusaha dalam Pelita III diselenggarakan pembinaan untuk meningkatkan

Up till now there are only 8 museums and 130 tourists objects.

In the period of 1984/1985 some 715 restaurants had been recorded. Their locations were spread in the whole region. Many of them were integrated in hotels and the remaining had their locations in the surrounding of big hotels like in Sanur, Kuta, the City of Denpasar or nearby tourists objects (See Table III-30).

Tabel / *Table III — 30*

RUMAH MAKAN DAN BAR DI BALI TAHUN 1984 - 1985
RESTAURANTS AND BARS IN BALI IN 1984 - 1985

No.	Uraian *Description*	Jumlah *Total*	Seats *Seats*
1.	Rumah makan/Bar tahun 1984 *Restaurant/Bar in 1984*	184	10.087
2.	Rumah makan/Bar tahun 1985 *Restaurant/Bar in 1985*		
	- Di dalam hotel *Inside hotel*	168	7.325
	- Di luar hotel *Outside hotel*	363	13.945

Sumber : Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
Source : Regional Tourism Office Bali.

It stands of reason that during their stay in Bali the domestic and foreign tourists have to spend their money.

In 1983 611,772 tourists had visited Bali and it had been recorded that one foreign visitor spent about Rp442,166.00 and one domestic tourist about Rp112,090.00. So the total amount of their spending was Rp171,558,555,820.00, i.e. from the foreigners Rp137,957,560,700.00 and from the domestic tourists Rp 33,600,995,120.00. With the assumption that this amount was the output of the tourism sector and the ratio of expenses of every sector which was directly linked with the tourism sector was the same ratio of contribution between the sectors which formed the PDRB, the gross additional value of the tourism sector had been estimated at Rp993,23 billion or 10,3% of the PDRB of Bali in 1983. The highest expenses per capita per nationality was from the Japanese tourists with the an average spending of Rp759,390,- per capita. In accordance with the characteristic of the Japanese tourists which prefered to come in groups, the highest expenses type was for parcel tours (53,58%) and the lowest for the shipping of goods (about 0,02%).

The same case happened with the domestic tourists with the highest expenses for parcel tours (24,96%). For the individual tourists the highest expenses was for lodging (16,53%), souvenirs (12,53%), food and drink (12,22%), local transportation (7,37%) and other things. The lowest expenses was for the exchange of money about 0,02%.

So the role of the tourism sector in the PDRB value of 10,3% in Bali consisted of : agriculture (0,12%), industry (1,02%), trade, hotel and restaurant (3,12%), transportation and communication (4,20%), banking and other finances (0,06%) and regional administration and public services (1,78%).

It is expected that in the coming years the role of the tourism sector shall increase because of the conviniences of direct flights from abroad to Bali which include Los Angeles, Honolulu, Guam, Hongkong, Malaysia, Japan, Singapore and Australia and which shall bring more foreign tourists to the island.

In the tourism sector, hotel business, when judged from the standpoint of employment, is considered medium or even small. However, economically, it has a good prospect since it has an occupancy rate of 46.9%. Its existence is socially accepted in the sense that the community is showing a positive attitude toward hotel business.

The amount of revenue from this sector is substantially inadequate, considering that while income may total Rp1.3 million, expenditure may amount to Rp900 thousand a month, thus leaving a nett income of only Rp400 thousand a month. Viewed from the social standpoint, such income has to be increased, among others, by developing the business.

In addition, there are other matters that demand attention, for example, the unintensive marketing effort and the unprofessional management of many hotels If these activities are improved, higher productivity will be attained in the form of higher occupancy rate.

7. Trade and Commerce

The expected aim of development in the trade and commerce sector is to support the increase of society's income in Bali by stressing the equity of development, so that the main living needs and consumption goods can be achieved within reasonable prices.

kemampuan manajemen yang diikuti 898 pengusaha, masing-masing melalui Proyek Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah 212 pengusaha, Proyek Peningkatan Peranan Wanita di bidang perdagangan 310 orang dan Proyek Pembinaan Pengusaha Muda 376 pengusaha,

f. **Di bidang perdagangan luar negeri, nilai ekspor daerah Bali pada Pelita III mengalami kenaikan sebesar 6,86% rata-rata per tahun dan pada 3 tahun pertama Pelita IV kenaikan itu rata-rata 24,3% per tahun.**

Untuk memperluas pemasaran hasil-hasil produksi terutama yang dihasilkan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah khususnya untuk barang-barang ekspor, diadakan pameran-pameran, pekan dagang, pekan penonjolan komoditi ekspor serta penyediaan fasilitas kredit (KIK dan KMKP) dan lain-lain.

Di bidang ekspor dengan adanya resesi yang melanda perekonomian dunia dan adanya persaingan yang tajam dari negara-negara penghasil komoditi yang sama di pasaran internasional, sangat mempengaruhi realisasi ekspor daerah Bali. Disamping itu negara-negara konsumen bagi komoditi tersebut, telah mengenakan quota terhadap ekspor negara-negara berkembang, antara lain terhadap komoditi garment (hasil kerajinan) dan kopi.

Bertitik tolak dari kebijaksanaan di bidang ekspor, perkembangan realisasi ekspor daerah Bali pada awal Pelita III menunjukkan kenaikan dari $ 15,220,510.19 menjadi $ 17,176,033.68 (1979-1980). Lihat Tabel III-31.

Tabel / *Table III — 31*

REALISASI EKSPOR DAERAH BALI DALAM REPELITA II DAN III TAHUN 1978 - 1983

EXPORT REALIZATION FROM BALI IN REPELITA II AND III IN 1978 - 1983

Pelita II Tahun 1978 / *in 1978*	Nilai / *Value* *$ 8,090,125,63*	Kenaikan *Increase*
Tahun 1979 / *in 1979*	$ 15.220.510.19	+ 11%
Tahun 1980 / *in 1980*	$ 17.176.033.68	+ 12%
Tahun 1981 / *in 1981*	$ 13.068.266.57	– 23%
Tahun 1982 / *in 1982*	$ 13.973.632.19	+ 6%
Tahun 1983 / *in 1983*	$ 19.847.606.51	+ 44%

Atas dasar perkembangan bidang perdagangan selama beberapa periode Pelita, maka dalam Repelita IV kebijaksanaan diarahkan untuk menciptakan iklim perdagangan yang menunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan devisa dengan mengadakan koordinasi yang lebih baik antar instansi di daerah.

Kebijaksanaan lainnya yang agak bersifat khusus antara lain : mewujudkan sistem pengadaan dan penyaluran yang effisien, mengusahakan terciptanya perluasan pasar, mengusahakan tersedianya sarana dan fasilitas fisik/non fisik, mengadakan monitoring secara berkala, mengusahakan terciptanya sistem pemasaran yang effisien, mengikut sertakan Koperasi dan KUD dalam menangani pemasaran berbagai komoditi dan memberikan penataran kepada golongan ekonomi lemah.

8. Koperasi

Peranan Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota (di daerah Bali) pada waktu panen. Anggota dengan mudah menjual padi/gabah kepada KUD dengan harga yang layak, petani yang memerlukan pupuk dengan mudah dapat membeli di KUD (Koperasi Unit Desa) dengan harga ringan dan kualitas terjamin.

Pembinaan Koperasi di Daerah Tingkat I Bali telah dilaksanakan sejak Pelita I, II dan Pelita III dan juga telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dari perkembangan jumlah Koperasi (KUD) setiap tahunnya yang terus bertambah/berkembang sekitar 12%. Seluruh kecamatan di Bali (51 kecamatan) masing-masing telah memiliki sebuah KUD bahkan beberapa kecamatan telah memiliki KUD sebanyak 2 buah dan dari 73 buah KUD yang ada di daerah Bali ini 52 buah diantaranya sudah merupakan KUD Model, sesuai dengan Inpres No 2 Tahun 1978.

Jumlah Koperasi yang berbadan hukum di daerah Bali sampai Tahun 1984 ada sebanyak 471 buah, yang menuntut tingkatannya terdiri dari: (a) Primer sebanyak 450 buah, (b) Pusat sebanyak 20 buah dan (c) Koperasi Gabungan sebanyak 1 buah. Dari jumlah 471 tersebut Badan Hukum Koperasinya terdiri atas : (a) Badan Hukum Penyesuaian sebanyak 127 buah dan (b) Badan Hukum baru sebanyak 344 buah.

Besides, efforts have also been made to expand the marketing of those products all over the country and abroad.

At the beginning business activities in the Province of Bali had the tendency to be concentrated only in the big cities like Singaraja and Denpasar. In Pelita III however, those activities had been evenly spreaded in the other district towns because of the smoother flow of consumption goods traffic, the better road facilities and the suitable transportation facilities. Besides, two new business offices had been established in the districts of Jembrana and Klungkung in the framework of increasing services to the society. There was also more marketing facilities like the Inpres markets and shopping centres in the other district towns.

The development of the trade sector in the period of Pelita III had been marked, among other things, with :

a. *the stockpiling and distribution of the main living needs and consumption goods within reasonable prices,*
b. *the increase of supporting facilities like the establishment of 17 public markets for about 3,846 merchants with the Inpres budget,*
c. *the increase of agricultural products and the expansion of new commodities like clove, vanilla, decoration fishes and weeds which formed the support of export rise of the Bali region,*
d. *the number of legal merchants (who owned the SIUP certificate) which showed an increase of 107,20%, i.e. the increase from 7,454 companies at the end of Pelita III to 15,441 companies in 1983.*
e. *to support the efforts in increasing the quality of the entrepreneurs in Pelita III, promotion in intensifying management capability had been executed which was attended by 898 entrepreneurs, i.e. 212 entrepreneurs attending the project of the puny economic group promotion, 310 persons attending the project of the womens role promotion in the business field and 376 entrepreneurs attending the project of the young business men promotion,*
f. *the export value of Bali in Pelita III in the sector of foreign trade had an average increase of 6,86% per year and in the first three years of Pelita IV had risen about 24,3% per year.*

The role of the trade and commerce sector during Pelita III was quite substantial.

To expand the marketing of products in particular those produced by the puny economic groups, especially the export commodities, exhibitions, trade fairs, export commodity promotion fair had been held beside the available credit facility supply (KIK, small investment credit and KMKP, permanent working capital credit) and others.

The realization of commodity export from Bali was badly influenced by the world recession in the economic sector and also by the sharp competition with other countries which produced the same export commodities in the world market. Besides, the consumer countries for those commodities had drawn up a quota for the export of developing countries, among other things a quota for garment and coffee commodities.

Starting from the export sector policy, the development of the export realization from Bali at the beginning of Pelita III had made an increase from $15,220,510,19 to $17,176,033,68 (1979-1980). (See Table III-31).

Based on the trade sector development during a number of Pelita periods, the policy in Repelita IV is aimed to crate a trade climate which could suport the economic development so that the income of foreign exchange and of the society could be increased by means of a better coordination between the regional administration involved.

Other policies are to create an efficient stockpiling and distribution system, to make efforts in the expansion of the marketing, to make efforts in obtaining the necessary physical/non-physical facilities, to have a periodical supervising system, to make efforts in obtaining an efficient marketing system, to have the participation of the cooperative and KUD (= rural cooperative) in the common marketing of all kinds of commodities and to upgrade the puny economic groups.

8. Cooperatives

To role of cooperative as the mainstay in the national economy is very profitable for its members (in the region of Bali) during the harvest time. The cooperative members can easily sell their paddy/unhulled ricegrains to the KUD with reasonable prices and from this KUD the farmers can easily buy the fertilizer they need with a low price and the guarantee of good [illegible].

The promotion of cooperative in the Province of Bali had [illegible] executed since Pelita I, II and Pelita III with satisfactory results. This [illegible] from the yearly development of the cooperatives (KUD) number which continuously increased with about 12%. Every sub-district (in total 51 sub-districts) in Bali has at least one KUD and some of them two. From the existing 73 KUDs, 52 of them had been promoted as a KUD-Model in accordance with the Inpres Decree No 2/1978.

The number of cooperatives in the form of corporate bodies until 1984 is 471 units and in accordance with the status these units were devided into : (1) 450 primary units, (b) 20 central units and (c) joint cooperative. These

Jumlah Koperasi non KUD pada Tahun 1978 sebanyak 204 buah, meningkat menjadi 361 buah pada Tahun 1982, sedangkan jumlah KUD dari 65 buah meningkat menjadi 78 buah (1978-82).

Selain dari jumlah koperasinya, perkembangan koperasi di daerah Bali terlihat juga dari segi perkembangan jumlah anggotanya, dimana pada tahun 1978 anggota Koperasi non KUD sebanyak 36.882 orang meningkat menjadi 69.272 orang pada Tahun 1984. Sedangkan jumlah anggota KUD sebanyak 22.046 orang meningkat menjadi 100.646 orang (1978-1984). Demikian pula kalau dilihat dari permodalan yang menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada Tahun 1978 : modal sendiri sebesar Rp 804.482.612,- dan pinjaman sebesar Rp 613.157.537,- kemudian pada Tahun 1979 menunjukkan : modal sendiri sebesar Rp 1.197.742,- dan pinjaman sebesar Rp 718.776.274,-, Tahun 1980 : modal sendiri sebesar Rp 2.014.971.603,-, pinjaman sebesar Rp 1.122.517.947,- dan pada Tahun 1981 : modal sendiri sebesar Rp 3.042.480.000,-, pinjaman sebesar Rp 2.109.485.000,-. Peningkatan terlihat pula dari jumlah simpanan-simpanan seluruh koperasi vang ada di Bali.

Dalam rangka mengisi kegiatan koperasi khususnya didalam memberikan pelayanan usaha pada anggota dan masyarakat, dapat dilihat dari perkembangan volume usaha, dimana Tahun 1978 sebesar Rp 6.021.969.000,- meningkat menjadi Rp 16.098.124.000,- pada Tahun 1984. Lihat Tabel III-32, III-33, dan III-34.

Tabel / *Table III — 32*

PERKEMBANGAN KUD/NON KUD DI BALI
SELAMA PELITA III (1979-1984)
DEVELOPMENT OF KUD/NON-KUD COOPERATIVES IN BALI DURING PELITA III (1979-1984)

No.	Tahun *Year*	KUD *Rural Cooperatives*	Non KUD *Cooperatives*	Jumlah *Total*
1.	1979	67 buah / units	201 buah / units	268 buah / units
2.	1980	68 buah /	209 buah / units	277 buah / units
3.	1981	73 buah / units	238 buah / units	311 buah / units
4.	1982	78 buah / units	361 buah / units	439 buah / units
5.	1983	84 buah / units	382 buah / units	466 buah / units
6.	1984	84 buah / units	382 buah / units	466 buah / units

Sumber Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Bali
Source : Regional Office of the Department of Cooperatives, Bali.

Tabel / *Table III — 33*

JUMLAH ANGGOTA KOPERASI/KUD
NUMBER OF COOPERATIVE/KUD MEMBERS

No.	Tahun *Year*	KUD	Non KUD	Jumlah *Total*
1.	1979	27.504	34.924	63.428
2.	1980	38.081	41.211	79.292
3.	1981	55.406	42.401	97.807
4.	1982	67.928	45.652	113.580
5.	1983	94.654	64.000	158.654
6	1984	100.646	69.272	169.918

Sumber Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Bali
Source : Regional Office of the Department of Cooperative, Bali.

Adapun mengenai jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan koperasi/KUD adalah untuk pengadaan pangan, penyaluran pupuk dan obatan-obatan, keperluan 9 bahan pokok dan Kredit Candak Kulak.

Sebagai bukti bahwa pembinaan Koperasi/KUD di daerah Bali ini berhasil, dapat diketahui adanya KUD-KUD yang meraih juara seperti:

- KUD Suluhan Bangli meraih juara Tingkat Nasional :
  a. Juara II pada tahun 1980.
  b. Juara I pada tahun 1981 dan
  c. Teladan pada tahun 1982.
- Koperasi Bebandem Karangasem meraih Juara Tingkat Nasional :
  a. Juara II pada tahun 1982 dan
  b. Juara III pada Perlombaan Koperasi 1983.
- Primkopol Tabanan meraih Juara Tingkat Nasional : Juara Harapan pada tahun 1980.
- Koperasi Tabungan Nasional di Singaraja meraih Juara Tingkat Nasional : Juara Harapan pada Tahun 1980.
- Koperasi Serba Usaha Surya Merta Gumbrih Jembrana meraih Juara Tingkat Nasional : Juara Harapan pada Tahun 1981.
- Dalam pengadaan pangan untuk Propinsi Bali dalam Tahun 1980, 1981 dan Tahun 1982 berturut-turut selalu lunas (0).
- Penyaluran pupuk/obat-obatan di Bali berjalan lancar, baik PUSKUD

471 corporate bodies consisted of : (a) 127 adjusted corporate bodies and (b) 344 newly established corporate bodies.

The number of non-KUD cooperatives in 1978 was 204 units and it rose to 361 units in 1982, whereas the number of KUDs increased from 65 units to 78 units (1978-1982). (See Table III-32).

Beside the number of cooperatives, their development in the region of Bali could be observed from the number of members. Between 1978 and 1984 the number of non-KUD cooperative members had increased from 36,882 to 69,272 persons, whereas the KUD members had increased from 22,046 to 100,646 persons. (See Table III-33).

From the capital point of view there was also an increase; in 1978 the own capital was Rp804,482,612,- and the loan was Rp613,157,537; in 1979 the own capital was Rp1,197,742,- and the loan was Rp718,776,274,-; in 1980 the own capital was Rp2,014,971,603,- and the loan was Rp1,122,517,947 and in 1981 the own capital was Rp3,042,480,000,- and the loan was Rp2,109,485,000,-. The increase could also be seen from the savings of all cooperatives in Bali. (See Table III-34).

Tabel / *Table III — 34*

SIMPANAN—SIMPANAN SELURUH KOPERASI
DI DAERAH TINGKAT I BALI
SAVINGS OF ALL COOPERATIVES IN THE PROVINCE OF BALI

No.	Tahun *Year*	Simpanan (Rp) *Savings (Rp)*
1.	1978	385.581.294,-
2.	1979	439.968.357,-
3.	1980	791.902.506,-
4.	1981	1.123.482.000,-
5.	1982	1.834.129.399,-
6.	1983	2.522.569.718,-
7.	1984	2.689.205.922,-

Sumber Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Bali
Source : Regional Office of the Department of Cooperatives, Bali.

In the framework to intensify the activities of cooperatives, in particular the business services to the members and the society, the business volume increased from Rp6,021,696,000 in 1978 to Rp16,098,124,000,- in 1984.

The types of business activities which were executed by the cooperative KUD included stockpiling of food, distributing fertilizer and pesticides, distribution of the 9 necessities of life, and serving the members with Candak Kulak Credit (A small loan to be used in purchasing goods for immediate resale) if they need it.

The successful results of the promotion of the cooperative/KUD in Bali was proved by some of the KUDs which had succeeded to win awards :

- *KUD Suluhan of Bangli became winner in the national level competition :*
  a. Second prize in 1980,
  b. First prize in 1981, and
  c. Declared as KUD model in 1982.
- *Bebandem cooperative in Karangasem became winner in the national level competition :*
  a. Second prize in 1981, and
  b. Third prize of the cooperative competition in 1983.
- *The Primkopol in Tabanan became winner in the national level competition : consolation prize in 1980.*
- *The National Savings Cooperative in Singaraja became winner in the national level competition : consolation prize in 1980.*
- *The cooperative "Serba Usaha Surya Merta Gumbrih" in Jembrana became winner in the national level competition : consolation prize in 1981.*
- *The spare for the stockpiling of food in the Province of Bali in 1980, 1981, 1982 had always been met in full.*
- *The distribution of fertilizer/pesticides in Bali was always smooth, there was no claims for the PUSKUD and KUD and the credits received from the BRI (Indonesian People's Bank) had been paid off in time.*
- *The Bimas credit via the KUD, 50 credits in total, had been executed in accordance with the plan.*
- *Many of the warehouse facilities, the foodstuff drying floor (GIK) and kiosks were established by the KUD.*

The policy for cooperative development in Repelita IV includes the promotion of : (a) the capability of the cooperative/KUD and other primary cooperatives to make initiatives and to have self-activities, (b) the capability of the cooperative/KUD as the main vehicle to promote the business capacity of the puny economic groups and (c) the participation of members to play and active role in the activities of the cooperative/KUD. Besides, efforts will also be made to be made to increase the cooperative business in various sectors of economy like : Agriculture, the People's handicraft, small industry, fishery, transportation and others. Whereas the main programme which have to be executed to achieve the aim of the cooperative sector development in the period of Repelita IV will be the promotion of the cooperative organiza-

dan KUD belum terjadi claim, kredit yang diterima dari BRI telah dibayar pada waktunya.
- Kredit Bimas melalui KUD sebanyak 50 buah berjalan sebagaimana mestinya.
- Sarana gudang, lantai jemur (GLK), kios-kios banyak yang dibangun oleh KUD.

Adapun kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam pembangunan koperasi pada Repelita IV khususnya adalah meningkatkan : (a) kemampuan Koperasi/KUD dan Koperasi Primer lainnya untuk berprakarsa dan berswakarya, (b) kemampuan Koperasi/KUD sebagai wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah dan (c) partisipasi anggota Koperasi untuk berperan aktif dalam kegiatan Koperasi/KUD. Disamping itu diusahakan pula peningkatan bidang usaha Koperasi di berbagai sektor ekonomi seperti : Pertanian, Kerajinan Rakyat, Industri Kecil, Perikanan, Angkutan dan lain-lain. Sedangkan program pokok yang ditempuh dalam mencapai tujuan pembangunan sektor koperasi selama periode Repelita IV adalah pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi yang meliputi pembinaan, bimbingan dan pengadaan sarana-sarana lepas panen.

9. Transmigrasi

Bali yang luas wilayahnya 5.632,86 Km², menurut sensus penduduk tahun 1980, jumlah penduduknya telah mencapai 2.469.724 jiwa, berarti kepadatan penduduk rata-rata 438 jiwa/km². Dari hasil sensus tersebut, diperoleh bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Bali per tahun adalah 1,69%, dengan demikian dalam 10 tahun mendatang penduduk Bali akan bertambah sebanyak 405,326 jiwa atau lebih kurang 81.065 KK. Angka ini didapati dengan asumsi bahwa KB menekan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,03% per tahun.

Di lihat dari segi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Bali hidup dari sektor pertanian. Tanah pertanian yang tersedia adalah seluas 403,717,79 Ha. Dan bila dibagi antara luas areal pertanian dengan jumlah penduduk, maka setiap keluarga petani hanya akan mengerjakan :

a. sawah : 0,06 Ha
b. ladang : 0,19 Ha, sehingga jumlahnya 0,25 Ha.

Menurut UU Pokok Agraria bahwa setiap keluarga petani memerlukan tanah minim 1-2 hektar untuk dapat hidup layak. Oleh karenanya penduduk Bali yang sekarang berjumlah 2.469.724 jiwa (± 494.050 KK) terdiri dari petani (68%) atau 335.954 KK memerlukan tanah pertanian seluas 335.954X2 Ha - 671.908 Ha. Ini berarti bahwa petani di Bali masih kekurangan tanah pertanian seluas 671.908 Ha - 403.718 Ha (pembulatan dari 403.717,79 Ha) = 268.190 Ha. Dengan kata lain, di Bali ini terdapat kurang lebih 134.095 KK yang tidak memiliki tanah pertanian. Hal ini merupakan pengangguran yang tidak kentara di Bali, khususnya di sektor pertanian. Keadaan ini dalam 10 tahun mendatang akan bertambah lagi sebanyak : 68% × 81.065 KK = 55.124 KK, sehingga seluruhnya berjumlah : 189.219 KK. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melaksanakan transmigrasi.

Semenjak pelaksanaan transmigrasi yang dimulai pada tahun 1953 (zaman pra Pelita) daerah Bali memberangkatkan para transmigran ke daerah penempatan sebanyak 10.230 KK atau 42.434 jiwa yang terdiri dari : Transmigrasi Umum sebanyak 8.190 KK (34.694 jiwa) dan transmigrasi Spontan sebanyak 2.040 KK atau 7.740 jiwa. Transmigran tersebut, ditempatkan di proyek-proyek transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB.

Semasa Repelita, penyelenggaraan transmigrasi mulai lebih meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada masa Pelita I Bali mempunyai target 5.399 KK dan telah dapat direalisir seluruhnya menuju ke proyek-proyek transmigrasi di Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Pada masa Pelita II Bali mendapat target 4.968 KK dan telah direalisir seluruhnya, menuju ke proyek-proyek transmigrasi di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Lampung. Kemudian dalam Pelita III direalisir pemindahan transmigran sejumlah 17.987 KK menuju ke proyek-proyek transmigrasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Timor-Timur, Irian Jaya, Sulawesi Utara dan Sumatera Selatan.

Dalam pembangunan sektor Transmigrasi untuk Repelita IV target secara nasional direncanakan sebesar 800.000 KK. Dan untuk menyusun rancangan rencana pemindahan transmigran dari Bali dalam Repelita IV, dengan sendirinya tidak terlepas dari keadaan daerah Bali itu sendiri, baik ditinjau dari segi kependudukan, areal tanah pertanian dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Disamping itu Bali me-

tion and the expansion of the cooperative busienss by means of promotion, guideline information and the establishment of post-harvest facilities.

9. Transmigration

In accordance with the sensus in 1980 the total population of Bali with a land surface of 5,632.86 Km² was 2,469,724 persons. This meant that the density of population was 438 persons per Km². The conclusion from this sensus was that the population growth per year would be 1.69% and that in the next 10 years the Balinese population would increase with 405,326 persons or about 81,065 heads of families.

This amount was given under the assumption that the birth control (KB) programme succeded in reducing the population growth by 0.03% per year.

From the manpower resource point of view, the biggest part of the Balinese population live from agriculture. The available agricultural land is 403,717.79 Ha. If this surface will be devided by the amount of population every farmer's family can only work on :

a. 0.06 Ha rice field and b. 0.19 Ha arable land, in total 0,25 Ha only.

In accordance with the Agrarian Basic Act, every farmer's family should need a minimum of 1-2 Ha land to be to live reasonably. So the Balinese population, 2,469,724 persons (± 494,050 heads of families) from which 68% were farmers or 335,954 head of families, would need agricultural land with a surface of 335,954 x 2 Ha = 671,908 Ha. This means that the Balinese farmers still need 671,908 Ha 403,718 Ha (rounding off of 403,717.79 Ha) = 268,190 Ha of agricultural land. In other words, about 134,095 heads of family have no agricultural land. And this too means disquised unemployment in Bali, in particular in the agricultural sector. In the next 10 years this condition will increase again with 68% x 81,065 heads of family = 55,124 heads of family, in total 189,219 heads of family. One of the method to solve this problem is the execution of transmigration.

Since the beginning of the transmigration programme in 1953 (long before the Pelita), the region of Bali had sent 10,230 heads of family or 42,434 persons divided into 8,190 families (34,694 persons) by the general transmigration programme and 2,040 families (7,740 persons) by the spontaneous transmigration programme to their respective resettlements in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and West Nusa Tenggara.

In the period of Repelita, the execution of the transmigration programme has been increased, not only in its quantity but also in the quality. The transmigration target of 5,399 families in Bali during Pelita I had been fully realized. They were sent to the transmigration projects in South Sumatra, South East Sulawesi, Central Sulawesi, West Nusa Tenggara, South Kalimantan and Central Kalimantan.

The target of 4,968 families during Pelita II had also been completely realized. They were sent to the transmigration projects in South East Sulawesi, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, Central Kalimantan, South Kalimantan, South Sumatra and Lampung.

Then in Pelita III the transmigration of 17,987 families to the transmigration projects in South Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South East Sulawesi, East Timor, Irian Jaya, North Sulawesi and South Sumatra had been realized.

In the transmigration sector development the national target for Repelita IV is to move 800,000 families. And to prepare the planned moving of transmigrants out of Bali in Repelita IV, the actual condition of the island itself has to be taken into consideration concerning the population point of view, the agricultural land area and other things. Besides, Bali is a region which often suffers from natural disasters, among other things earth-quakes and volcano eruptions, while some part of the regions consists of critical and fallow land.

Considering the data mentioned above in the fourth Repelita 6,000 families are planned to be moved every year with the following specifications :

The first year (1984/1985) =	*4,800 families*
The second year (1985/1986) =	*5,280 families*
The third year (1986/1987) =	*6,000 families*
The fourth year (1987/1988) =	*6,720 families*
The fifth year (1988/1989) =	*7,200 families*
Total =	*30,000 families.*

This distribution is based on the assumption that :

a. at this time the plan to move the transmigrants depends on the available facilities for 4,800 families.
b. the serious efforts to obtain various facilities will be fulfil' ' so that the yearly target of transmigrant moving will increase by 10%, 15% and 10% from the target of the first year.

In preparation of the fulfilment of this transmigration plan, the main target of the mobilization of the transmigration candidate includes labours in agriculture, fishermen, dam fishery and animal husbandry. And also the labours in the sali production the farmers who work for other farmers and all the other farmers who own not more than 0,25 Ha per family.

Considering the living conditions of those labours and farmers without overlooking the criteria, the priority region of mobilization of transmigra-

rupakan daerah yang sering ditimpa bencana alam, antara lain; gempa bumi dan gunung meletus/gunung berapi serta beberapa bagian daerahnya terdiri dari daerah kritis dan tandus.

Dengan memperhatikan data-data tersebut, maka dalam Repelita IV direncanakan setiap tahunnya adalah 6.000 KK dengan perincian sebagai berikut :

Tahun I (1984/1985)	=	4.800 KK
Tahun II (1985/1986)	=	5.280 KK
Tahun III (1986/1987)	=	6.000 KK
Tahun IV (1987/1988)	=	6.720 KK
Tahun V (1988/1989)	=	7.200 KK
Jumlah	=	30.00 KK

Pembagian tersebut, didasarkan perkiraan :

a. kemauan pemindahan transmigran saat ini berdasarkan sarana yang ada untuk 4.800 KK;
b. memperjuangkan berbagai sarana yang diperlukan sehingga tiap tahun target pemindahan transmigran masing-masing sekitar 10%, 15% dan 10% dari target tahun pertama.

Dalam usaha memenuhi rencana pemindahan transmigran tersebut. Sasaran utama pengerahan calon transmigran adalah buruh tani, nelayan, buruh tambak dan buru peternakan. Juga diarahkan kepada petani gurem, yaitu para petani yang mengerjakan tanah orang lain, petani yang mengerjakan tanahnya sendiri dan tanah orang lain serta petani yang mengerjakan tanah sendiri, dimana ketiga kelompok tersebut mengusahakan tanah kurang atau lebih dari 0,25 Ha/KK.

Dengan memperhatikan keadaan para petani tersebut, tanpa meninggalkan kriteria daerah prioritas pengerahan calon transmigran selama Repelita IV diarahkan ke daerah-daerah sebagai berikut :

1. Kabupaten Badung	:	4.000 KK
2. Kabupaten Gianyar	:	4.000 KK
3. Kabupaten Klungkung	:	2.500 KK
4. Kabupaten Bangli	:	2.500 KK
5. Kabupaten Karangasem	:	4.000 KK
6. Kabupaten Tabanan	:	4.000 KK
7. Kabupaten Jembrana	:	4.000 KK
8. Kabupaten Buleleng	:	4.000 KK
Cadangan	:	1.000 KK

Sejak Pra Pelita pemindahan transmigran Bali sebagian besar ditempatkan di daerah-daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Irian Jaya.

Saat ini daerah-daerah tujuan yang berkenan di hati para transmigran adalah daerah non-pasang surut terutama daerah Sulawesi. Namun telah berkembang pula animo masyarakat ke daerah non-pasang surut di Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan. Melihat kemungkinan penempatan transmigran di Sulawesi semakin jenuh, sedang yang masih terbuka luas adalah daerah-daerah di Kalimantan maupun Irian Jaya, maka arus transmigran Bali akan diarahkan ke daerah-daerah dengan mengusahakan peningkatan sarana penunjang yang diperlukan dalam tiap-tiap tahun anggaran selama Repelita IV.

Dengan penempatan transmigran Bali terutama ke daerah Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya, maka sebelum para transmigran tersebut ditempatkan ke daerah-daerah transmigrasi, terlebih dahulu lokasi-lokasi yang akan dijadikan pemukiman diadakan penelitian secara mendalam oleh Lembaga-lembaga peneliti dan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan instansi transmigrasi. Setelah lokasi dinyatakan layak huni, baru daerah yang diperuntukkan bagi transmigran dibuka.

Jika dalam Pelita III masalah transmigrasi ini dikelola oleh BAKOPTRANS, maka dalam Repelita IV penanganannya langsung oleh Departemen Transmigrasi, dimantapkan dalam Repelita V untuk bisa tinggal landas dalam Repelita VI. Sehingga tujuan transmigrasi akan dapat tercapai dalam Repelita selanjutnya. Adapun langkah-langkah yang perlu diprogramkan dalam penyusunan program Repelita IV adalah sebagai berikut :

a. Proyek pemindahan transmigrasi dari Bali dengan rencana target sebesar 30.000 KK
b. Proyek pendidikan transmigrasi di Bali dengan target sebanyak 1.375 orang
c. Proyek penelitian dan perencanaan sosial ekonomi dan pengembangan lingkungan daerah asal transmigrasi.
d. Proyek koordinasi satuan pembina penyelenggaraan transmigrasi Tingkat I/II Bali.
e. Proyek prasarana fisik dan program bantuan transmigran.

10. Pengembangan Dunia Usaha

Sesuai dengan sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia yaitu Demokrasi Ekonomi, maka pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi yang didalamnya terkandung maksud

tion candidates during Repelita IV will be :

1. The District of Badung	:	*4,000 families*
2. The District of Gianyar	:	*4,000 families*
3. The District of Klungkung	:	*2,500 families*
4. The District of Bangli	:	*2,500 families*
5. The District of Karangasem	:	*4,000 families*
6. The District of Tabanan	:	*4,000 families*
7. The District of Jembrana	:	*4,000 families*
8. The District of Buleleng	:	*4,000 families*
and reserves	:	*1,000 families*

Since long before the Pelita a big part of the transmigrants from Bali was sent to the transmigration regions of Sumatera, Sulawesi, Kalimantan and Irian Jaya.

At this moment the desire of the transmigrants is to be sent to areas free from water level variations caused by ebb and flood, in particular to the regions of Sulawesi. But there is also a tendency that Kalimantan, in particular of South Kalimantan, will be their next preference.

Since Sulawesi has already enough transmigrants, the future transmigration will be directed to the regions in Kalimantan and Irian Jaya. For this purpose, efforts have ben made to increase the necessary supporting facilities in every fiscal year during Repelita IV.

Before the transmigrants are be sent to Kalimantan, Sulawesi and Irian Jaya, first of all the transmigration projects have to be examined by Research Institutes and Universities in coordination with transmigration administration. After this feasibility study and after it has been declared as suitable for human living, the region involved can be opened for transmigration.

While the transmigration problem in Pelita III was handled by the BAKOPTRANS, in Repelita IV it will be directly managed by the Department of transmigration and in Repelita V it will be consolidated in preparation for the "take off" in Repelita VI, so that the aim of transmigration will be achieved in the future Repelitas. The necessary steps to be programmed during Repelita IV will be as follows :

a. Transmigration project from Bali with a planned target of 30,000 families.
b. Transmigration educational project in Bali for 1,375 persons.
c. Project for research and planning of the social economic condition and the development of environment in the transmigration area of origin.
d. Project for coordination of transmigration promotion units in district/provincial levels.
e. Projects for physical infrastructues and transmigration aids.

10. Development of The Business World

In line with the economic system which is adopted by the Indonesian Government, i.e. the economic democracy, the development of the society is based on this system which contains a message to the society to play an active role in the actual development activities. In the execution of the national development all the domestic potentials and capital capabilities have to be utilized with the necessary steps and in line with the policy to support and to direct the growth and to obtain a higher increase in capability of the puny economic groups to participate in the development process, in particular in the business world development sector.

In this way it can be self-supporting, among other things by means of intensifying the cooperative activities and to play an active role in the Indonesian economic system in conformity with the principle of relying on its own capability.

Therefore the cooperative as one of the corporate bodies which are in conformity with the definition of the UUD 1945 (the Constitution of 1945) must get a comprehensive opportunity to expand and to increase its promotion so that it will be capable to play an important role in the development. In the period of Pelita I, II and III, the Government had created many favourable conditions for the increase of participation of the business world in the development activities.

Generally the development of the business world in the Province of Bali in the recent years can be described as follows : based on the definitions of the Bali region, some activities are assigned to national entrepreneurs, among other things :

a) entrepreneurs in the field of some important commodities business,
b. entrepreneurs in the field of export and inter-insular merchants (coffee, kopra, fruit and others),
c. entrepreneurs in the field of tourism and tourist industry,
d. entrepreneurs in the field of banking and financing,
e. entrepreneurs in the field of construction and civil works, and
f. entrepreneurs in the field of transportation.

The activities of the national private business world in Bali went up and down as a result of the economic situation. The entrepreneurs mostly had to face a climate of uncertainty though many of them succeeded to make some progress.

bahwa masyarakat harus berperan secara aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu membimbing pertumbuhan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan khususnya dalam bidang pengembangan dunia usaha. Sehingga dengan demikian ia dapat berdiri sendiri antara lain dengan peningkatan kegiatan koperasi dan dapat berperan dalam tata ekonomi Indonesia, sesuai dengan prinsip percaya pada kemampuan sendiri. Untuk itu koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945 harus diberikan kesempatan seluas-luasnya dan ditingkatkan pembinaannya, sehingga benar-benar mampu memainkan peranan yang berarti dalam pembangunan. Pemerintah selama Pelita I, II dan Pelita III banyak menciptakan kondisi yang memberikan peningkatan keikut sertaan dunia usaha di dalam kegiatan pembangunan.

Secara umum dapat digambarkan perkembangan dunia usaha di Dati I Bali dalam tahun-tahun terakhir ini sebagai berikut : berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku sesuai kondisi obyektif daerah Bali, beberapa aktivitas dilaksanakan oleh usahawan-usahawan nasional, antara lain : a) Pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan atas beberapa komiditi penting, (b) Pengusaha yang bergerak dalam bidang ekspor, pedagang antar pulau (kopi, kopra, buah-buahan dan lain-lain), (c) Pengusaha yang bergerak dalam usaha kepariwisataan dan industri kepariwisataan, (d) Pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam usaha-usaha perbankan, (e) Pengusaha yang bergerak dalam bidang/sektor konstruksi dan bangunan serta (f) Pengusaha yang bergerak dalam usaha pengangkutan.

Kehidupan dunia usaha swasta nasional di Bali menunjukkan fase pasang surut, yang timbul akibat perkembangan perekonomian. Sehingga jika diamati secara teliti akan pengusaha-pengusaha kehidupannya kembang-kempis walaupun banyak juga yang mengalami sedikit kemajuan. Oleh karenanya untuk memanfaatkan modal dan potensi yang ada untuk meningkatkan pembangunan, maka selama periode Pelita I hingga Pelita III diambil beberapa kebijaksanaan yang langsung maupun tidak langsung mendorong pengembangan dunia usaha, antara lain perubahan undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perpajakan, yang kemudian untuk memperlancar penanaman modal.

Perubahan ini nampaknya memberikan pengaruh positif bagi perkembangan dunia usaha di Bali. Ini terbukti dengan adanya perkembangan volume keuangan yang berupa kegiatan pembangunan dengan menggunakan fasilitas PMDN dan PMA. Selain fasilitas PMDN dan PMA juga kredit-kredit perbankan lainnya yang langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi situasi perkembangan perekonomian pada umumnya.

Tahun 1983 masih ada aplikasi dalam rangka PMDN : (a) yang sudah mendapat Surat Persetujuan Sementara (SPS) sebesar Rp 44.000.000.000,00 dan (b) yang sedang dalam proses sebesar Rp 90.000.000,00. Perkembangan penanaman modal tersebut bergerak dalam berbagai bidang usaha, terutama dalam bidang Jasa Pariwisata.

Seluruh proyek PMDN dan PMA tersebut menyerap tenaga kerja yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia : 4.835 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 168 orang. Tujuan kebijaksanaan ini adalah untuk meningkatkan peranan dan partisipasi mereka dalam pembangunan agar setaraf dengan yang lainnya. Dengan demikian diharapkan terjadi pemerataan dan peningkatan pendapatan.

Dalam rangka meningkatkan dunia usaha, maka dalam Repelita IV ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : (a) meningkatkan kerjasama yang serasi antara Pemerintah, Perusahaan Milik Negara, dunia usaha swasta dan koperasi, (b) meningkatkan kewiraswastaan, keahlian dan kemampuan usaha, (c) meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan bantuan permodalan perkreditan dan bantuan pemasaran. Lihat Tabel III-35, III-36, *III-37, III-38 dan III-39.*

Therefore in the period of Pelita I until Pelita III some decisions had been made to utilize the existing capital and potentials for the increase of development. These decisions had to motivate directly or indirectly the development of the business world expansion, among other things the revision of acts concerning the investments of foreign (PMA) and domestic (PMDN) capital which had been adjusted with the tax policy and which later on could be used for the acceleration of capital investment.

This revision seemed to have a positive influence ont he development of the business world in Bali. This was proved by the development of finance volumes in the form of development activities by utilizing the PMDN and PMA facilities. Beside these facilities the credits of the banks of normally had also influenced directly or indirectly the situation of the economic development.

In 1983 there was still applications in the framework of the PMDN investment :

(a) for an amount of Rp44,000,000,000.00 which had been agreed with a preliminary letter of approval (SPS) and

(b) for an amount of Rp90,000,000.00 which was still in process. This development of capital investment was active in various business fields, particularly in the tourism service sector.

The labour in all the PMDN and PMA projects consisted of 4,835 Indonesian employees and 168 foreign employees. The aim of this policy was to increase their role and participation in the development and to achieve the same level of skill and knowledge of labours. The expectation from this system was to obtain an equitable and higher income.

In the framework of improving the business world the following steps in Repelita IV shall be taken :

(a) promoting a harmonious cooperation between the Government, the State-owned companies, the private business world and the cooperatives,

(b) promoting entrepreneurship, skill and business capability,

(c) proceeding, intensifying and perfecting credit capital aids and marketing aids. See Tables III-35, III-36, III-37, III-38 and III-39.

Tabel / *Table III — 35*

JUMLAH VOLUME USAHA SETIAP TAHUN SELAMA PELITA III DALAM RIBUAN RUPIAH

YEARLY BUSINESS VOLUME DURING PELITA III IN THOUSANDS OF RUPIAHS

Tahun *Year*	K U D *Rural Cooperatives*	Non K U D *Cooperatives*	J u m l a h *Total*
1978	4.099.902	1.921.794	6.021.696
1979	11.002.412	2.486.669	13.489.081
1980	15.418.680	280.236	21.698.916
1981	19.616.675	109.544	24.726.219
1982	-	-	40.536.866
1983	-		30.463.634
1984	-	—	16.098.124

Sumber :
Kantor Departemen Perdagangan Propinsi Bali. Tahun 1982, 1983, 1984 merupakan jumlah gabungan
Source : Regional Office of the Department of Propinsi Bali
In 1982, 1983, 1984 is a combined total.

Tabel / *Table III — 36*

DATA PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DI BALI DARI TAHUN 1969 S/D 1984

INVESTMENT IN BALI FROM 1969 UNTIL 1984

K I K KMKP Tahun *Year*	Investasi *Investment*	Jumlah Tenaga Kerja / *Employees* Indonesia *Indonesian*	Aing *Foreigner*
1969	—	—	—
1970	—	—	—
1971	9.118.132.765	829	3
1972	3.576.889.830	596	21
1973	—	—	—
1974	10.812.676.580	1.439	40
1975	—	—	—
1976	3.666.952.850	214	6
1977	11.902.000.000	2.300	7
1978	1.223.948.000	172	5
1979	—	—	—
1980	17.980.180.889,75	809	—
1981	36.861.295.000	1.912	18
1982	2.000.000.000	117	—
1983	78.302.875.905	1.991	22
1984	11.589.912.000	366	2
Jumlah semua PMDN / *Total*	187.034.866.819,75	10 745	124
Jumlah semua PMA / *Total*	US$ 73.094.940	2 267	152

Sumber : BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Source : BKPMD, the Province of Bali

Tabel / *Table III — 37*

PERKEMBANGAN KIK/KMKP DI PROPINSI DATI I BALI
SMALL INVESTMENT AND PERMANENT WORKING CAPITAL CREDIT IN BALI

Perkembangan s/d akhir *Development until the end of*	Nasabah *Client*	Nominal *Volume*	Nasabah *Client*	Nominal *Volume*
Maret/*March* 1977	1.827	185.000.000	3.216	6.137.000.000
Maret/*March* 1980	2.995	4.658.000.000	4.451	10.156.000.000
Maret/*March* 1981	4.940	6.388.000.000	9.163	17.276.000.000
Maret/*March* 1982	7.587	19.385.000.000	14.313	34.100.000.000

Tabel / *Table III — 38*

POSISI KREDIT PERBANKAN DI PROPINSI DATI I BALI 1)
BANK CREDITS IN THE PROVINCE OF BALI

Posisi pari/*Credit stand*	Nominal (Rp)
Akhir Maret/*End of March* 1977	31.872.000.000,-
Akhir Maret/End of March 1980	41.812.000.000,-
Akhir Maret/End of March 1981	70.428.000.000,-
Akhir Maret/End of March 1982	103.165.000.000,-

1) *Tidak termasuk Kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat.*
Not included credits from the People's Credit Bank

Tabel / *Table III — 39*

Bidang Usaha *Type of business*	Proyek *Project*	Investasi (dlm jutaan) *Investment (in million)*	Lokasi *Location*
1. Industri Minuman *Beverage industry*	2	2.431	Badung
2. Industri Tekstil *Textile industry*	1	2.827	Badung
3. Industri Gas *Gas industry*	1	3.434	Jenbrana
4. Industri Keramik *Ceramics industry*	1	533	Badung
5. Pengembangan Energi Listrik *Development of electric energy*	1	11.419	Bali
6. Pembinaan/Pengembangan Armada Pelayaran *Development of shipping Fleet*	3	4.858	Badung
7. Peningkatan Jasa Pariwisata *Development of Tourism Service.*	9	128.055	Badung
J U M L A H/*Total*	18	153.557	

BAB *CHAPTER IV*

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL
SOCIAL DEVELOPMENT

1. Agama

TAHUN 1984 di Bali 93,30% penduduknya beragama Hindu. Agama lain, Islam hanya 5,21%, Protestan 0,58%, Katholik 0,34% dan Budha 0,57% dan umumnya mereka merupakan masyarakat pendatang. Perkembangan jumlah pemeluk agama di Bali dapat dilihat pada Tabel IV-1.

Karena penduduk Bali sebagian besar penganut agama Hindu, corak masyarakat Bali terutama di pedesaan akan tampak sangat khas.

Ajaran agama ini masuk ke Bali melalui proses evolusi dengan dasar kesamaan dan persesuaian dalam pertemuan dari yang sudah ada dengan ajaran-ajaran yang dibawa masyarakat Hindu di Indonesia adalah mengikuti jalan evolusi, dan ini berarti atas dasar kesamaan dan persesuaian, pertemuan yang datang dan yang ada. Ajarannya tidak merupakan suatu konflik dengan apa yang ada, dan memberi inspirasi yang lebih tinggi dalam kehidupan kesucian jiwa.

Perkembangan agama Hindu di Bali sebagai **message of synthesis** yaitu menghormati kepercayaan yang ada dan mencari kesatuan jiwa untuk meninggikan hidup kerohanian dan tidak memperlihatkan kekerasan atau kebencian dan merendahkan atau melenyapkan apa yang ada.

Semua agama mengajarkan bahwa Tuhan tidak berbentuk dan tidak dapat digambarkan. Dengan kenyataan ini umat Hindu sangat memerlukan peragaan dari Ida Sanghyang Widhi yang tidak dapat digambarkan itu menjadi tergambar, yaitu berwujud pratima, berwujud dewa-dewi, banten catur dan sebagainya yang bersifat sementara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memantapkan rasa bhakti.

Jika kita lihat setiap bangunan umat Hindu di Bali diplaspas dan diurip (disucikan dan dihidupkan) bukanlah berarti bahwa umat Hindu itu animis. Semua kegiatan tersebut merupakan perlambang dan pernyataan dari perasaan dan pikiran.

Jika kita melihat "ider-ider" yaitu hiasan yang digantungkan diatap bangunan yang terdiri atas warna merah dan putih dimana bagian merahnya terletak di bawah dan bagian yang berwarna putih di atas, merupakan lambang bahwa bangunan rumah itu gambaran Bhuana Agung.

Demikianlah suatu bangunan merupakan bentuk mini dari dunia. Umat Hindu mengenal konsep bhuana alit buana agung (micro dan macro kosmos). Antara micro dan macro hendaknya terdapat keserasian seperti siput dan rumahnya. Dari konsep ini lahir astha kosala dan astha bumi. Setiap bangunan atau pekarangan hendaknya disesuaikan dengan keadaan tubuh dari pemiliknya.

Bukan saja benda-benda tetapi gerak alampun digambarkan dengan perlambang dunia berputar dan alam semesta.

Agama Hindu menggunakan lambang Swastika sebagai lambang pengharapan-mendapatkan keselamatan dari Ida Sanghyang Widhi. Selama angin mendesir, air mengalir dan selama matahari beredar, selama itulah umat Hindu percaya pada Ida Sanghyang Widhi akan memberi mereka anugerah.

1. Religions

IN 1984 the population of Bali comprised of Hinduists (93.30%), Moslems (5.21%), Protestants (0.58%), and Buddhists (0.57%). Most of the people had come as settlers.

Owing to the fact that most of the Balinese worship Hinduism, the people, particularly those living in rural areas, have typical way of life.

The religious teaching entered Bali by way of evolutionary process diffusing the existing and foreign values. They were not conflicting with each other but even created higher inspiration for spiritual life.

The growth of Hinduism in Bali constitutes "the message of synthesis", by which the existing believes are respected and higher spiritual life is sought. Therefore, it brings about no violence, hatred and other destructive attitudes.

The distribution of religion worshippers in Bali up to 1985 is shown in Table IV-1.

According to any religious teaching, God has no shape and is indescribable. To help the Hinduists visualize Ida Sanghyang Widhi, therefore, they created a pratima in the form of gods and goddesses. This way the sense of worship is strengthened.

The fact that each Hinduist building is purified and enlivened does not indicate that the Hinduists are animists. The activities constitute a symbol and reflection of feeling and thought.

The ider-ider (ornaments hung up over abuilding, the lower part of which is red and the upper part white in colour) symbolizes the Bhuana Agung.

According to the Hinduists' belief, a building is a miniform of the world. The Hinduists recognize the concept of bhuana alit (micro cosmos) and bhuana agung (macro cosmos). There is harmony between the two types of cosmos, just like a snail and its shell. The concept brings about astha kosala and astha bumi. Each building or yard should be adjusted to the physical condition of the owner.

Objects and natural movements are described as the rotating world and universe.

The Hinduists make use of the swastika to symbolize hope to gain safety from Ida Sanghyang Widhi. As long as wind blows, water flows and the sun rotates, the Hinduists believe that Ida Sanghyang Widhi will bestow them.

The Weda and principles of Hinduists teaching

The Hinduist teaching in Bali originates from the Weda handed over to the Maharsi (The Great Priest) as from 3,000 BC. The ascension of the devine revealations lasting for a period of 1,000 years was received by 7 great priests.

The devine revealations were further handed over orally and separately to the descendants and their followers. It was Bhagavan Abyasa who later gathered and systematically composed them.

The dominant school of all the Hinduists teachings coming and worshipped in Bali is that of Siwa Sidharta.

Any religion has some basis that their worshippers hold. The Hinduists recognize 5 fundamental beliefs called Panca Cradha (Cradha = basis; Panca = five), e.i. :

a. Widhi Tatwa, belief in the One Supreme God

b. Atma Tatwa, belief in atma (spirit) existing in a human body.

Tabel / *Table IV — 1*

JUMLAH PEMELUK AGAMA DI PROPINSI DATI I BALI TAHUN 1981-1985
NUMBER OF RELIGIOUS BELIEVERS IN BALI PROVINCE, 1981-1985

No.	Tahun *Year*	PEMELUK AGAMA /*Religious Bilievers*					Lain-lain *Others*	Jumlah *Total*
		Islam *Moslem*	Hindu *Hinduist*	Budha *Buddhist*	Protestan *Protestants*	Katholik *Catholics*		
1.	1981	123.349	2.303.450	14.589	12.917	8.747	288	2.463.340
2.	1982	124.111	2.311.788	14.533	12.917	8.473	19.257	2.491.029
3.	1983	132.701	2.334.129	13.505	12.609	8.405	—	2.501.349
4.	1984	129.570	2.321.372	14.163	14.542	8.365	—	2.488.012
		(5,21)	(93,30)	(0,57)	(0,58)	(0,34)		(100)
5.	1985	132.052	2.383.052	14.899	13.244	8.841	—	2.552.068
		(5,17)	(93,38)	(0,58)	(0,52)	(0,35		(100)

Sumber : Kanwil Dep. Agama Propinsi Bali
Source : Regional Office, Ministry of Religious Affairs, Bali.

Weda dan Pokok-pokok Ajaran Agama Hindu.

Ajaran agama Hindu yang terdapat di Pulau Bali bersumber dari Weda yang diterima oleh para Maharsi sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Turunnya wahyu Weda itu berlangsung lebih kurang 1000 tahun dan diterima oleh 7 Maharsi.

Wahyu-wahyu ini dilanjutkan kepada turunan dan pengikut-pengikutnya secara lisan dan terpisah-pisah. Baru kemudian **Bhagawan Abyasa** mengumpulkan wahyu-wahyu itu semua dan disusun secara **sistematis.**

Dari semua ajaran-ajaran yang datang dan diterapkan di Bali khususnya aliran agama Hindu yang masuk dan berpengaruh di Indonesia umumnya di Bali adalah aliran Ciwa Siddhanta.

Tiap agama mempunyai dasar kepercayaan yang membawa manusia penganutnya mempunyai keyakinan hakiki. Agama Hindu mengenal 5 butir keyakinan hakiki yang disebut Panca Cradha (Cradha = dasar keyakinan, panca = lima), yaitu :

a. Widhi Tatwa, keyakinan terhadap adanya Tuhan Maha Esa.
b. Atma Tatwa, yaitu keyakinan tentang atma yang ada dalam diri manusia.
c. Karmapala, ialah hukum sebab akibat dari pada suatu perbuatan.
d. Punarbhawa Tatwa, merupakan keyakinan tentang menjelma kembali.
e. Moksa Tatwa, ialah keyakinan tentang menyatunya jiwatma dengan Paratama.

Hari-hari Libur Agama Hindu

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden no. 3 tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No 10 tahun 1971 telah ditetapkan hari Raya Nyepi (peralihan tahun Caka) sebagai Hari Libur Nasional. Hari Raya Nyepi merupakan hari pergantian tahun Caka bagi umat Hindu di Indonesia, dan Bali khususnya. Adapun rangkaian Hari Raya Nyepi terdiri atas : **melasti** (meklis), **tawur, sipeng** dan **ngembak geni.**

Hari-hari libur yang lain untuk umat Hindu ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 16 Februari 1983 No 00311/2454/Binsos Mental, sebagai berikut :

1) Hari Raya Saraswati
2) Hari Raya Pagerwesi
3) Hari Raya Ngembak Geni
4) Hari Raya Penamapahan Galungan
5) Hari Raya Galungan
6) Hari Raya Umanis Galungan
7) Hari Raya Kuningan.

Hari Raya Saraswati adalah hari sastra dan ilmu pengetahuan. Bahkan disebut pula hari piodalan yang Sanghyang Aji Saraswati, yang jatuh pada hari Sabtu Umanis, Uku Watugunung. Pada hari tersebut semua pustaka-pustaka suci dan ilmu pengetahuan lainnya disucikan dan dibuatkan upacara tertentu. Dewi Saraswati adalah caktinya Dewa Brahma. Brahma adalah pencipta segala yang ada dan segalanya berkembang dalam rasa keindahan dan berbagai ilmu pengetahuan. Karena itu Dewi Saraswati adalah sumber semua ilmu pengetahuan dan rasa keindahan. Beliau dipuja karena memberikan ilham kepada manusia tentang segala rasa keindahan, kreasi dan ketajaman pikiran untuk mengetahui dan merasakan segala yang ada itu.

Dewi Saraswati dilambangkan sebagai seorang wanita yang berparas ayu dan anggun berdiri di punggung seekor angsa. Burung angsa yang putih ini diibaratkan sebagai penjaga yang selalu waspada. Dewi Saraswati digambarkan bertangan empat, satu memegang tasbih yang melambangkan gerak yang tidak pernah berhenti satu memegang buku atau lontar yang melambangkan ilmu pengetahuan, satu lagi memegang rebab, alat musik yang bernada halus dan lembut melambangkan keindahan serta satu lagi memegang bunga teratai yang melambangkan kesucian dan kedamaian.

Pada hari raya penting agama Hindu orang tidak boleh menagih piutang. Barang siapa menagih piutangnya pada hari Rebo Kliwon Dungulan (Galungan), patut dihilangkan piutangnya. Kesalahannya bernama "Anumiringaken sandinging pitara". Peraturan ini benar-benar mengandung pendidikan budi pekerti dan memuliakan hari-hari suci. Sampai bisa melenyapkan hak piutangnya kalau sampai berani menagih pada hari suci. Jiwa dari pada peraturan ini masih dihormati oleh orang Bali. Dimana pada hari-hari suci mereka tidak akan mau menagih piutang. Karena dianggap benar-benar tidak bermoral. Jiwa adat kebiasaan yang bersumber langsung pada pandangan agama. Orang tidak boleh menjual padi sebelum padi masak, (mantenin Bahasa Bali). Kalau terjadi tindakan menjual padi yang masih muda subak akan mendenda orang itu (Subak organisasi pertanian). Materi peraturan ini berakibat yang sangat baik pada masyarakat petani di Bali.

c. Karmapala, cause-effect law for any deed.
d. Punarbhawa Tatwa, belief in reincarnation.
e. Moksa Tatwa, belief in the integration of Jiwatwa and Paramatwa.

Hinduist Holidays

Pursuant to the Decree of the President No 3 of 1983 on the Amendment to the Decree of the President No 251 of 1967, the Nyepi Day constituting the transition of the Caka year for Hinduists in Indonesia, particularly in Bali, has been stipulated as a National holiday. It consists of melasti, tawur, sipeng and ngambak geni.

The other Hinduist holidays as stipulated in the Decree of the Governor of Bali No 00311/2454/Binsos Mental dated 16 February 1983, are as follows :

1) Saraswati holiday
2) Pagerwesi holiday
3) Ngembak Geni holiday
4) Penmapahan Galungan holiday
5) Galungan holiday
6) Umanis Galungan holiday
7) Kuningan holiday

The Saraswati holiday is a day of literature and science which is held on 'Ukumanis' Saturday, ***Uku*** *(the year of) Watugunung. On that day holy books and other literary works are purified by means of a ceremony. The goddess Saraswati is the* ***Cakti*** *of the god Brahma. Brahma is the creator of everything and they develop in aesthetic and scientific sense. Therefore, goddess Saraswati is the source of all the science and aesthetic sense. She is adored for giving human beings inspiration of any aesthetical sense, creativity and wit in order to discover and sense everything.*

Goddess Saraswati is described as a beautiful and haughty woman standing on the back of a swan. This white swan symbolizes a watchful guard. Goddess Saraswati is described as four extending hands, each holding beads, a book or papyrus, a musical instrument, and water lily respectively. The beads symbolize constant movement, the book or papyrus science and water lily purity and peacefulness.

Balinese are law-abiding people. They do not press for payment of debt during important holy days. Any debtor can even be exempted from the duty of repaying their debt if they are pressed to do so. The faulty deed of pressing payment of debt is called "Anumiringaken sandinging pitara". Anyone is not allowed to sell rice before it ripens. Otherwise they will be fined by ***Subak*** *(farming organization). This rule makes Bali free from the system of 'ijon'.*

Despite the achievements in religious life resulting from developmental efforts during Repelita III, solution to fundamental problems is still being sought. These problems include practical and popular knowledge of religious teaching and Balinese tradition and custom as well as the interpretation of the aspects of Hinduist religious teaching and development of puras outside Bali, particularly in transmigration areas. It is felt that a Hinduist Religious Court Office and Hinduist Religious Affairs Office at subdistrict level is required.

Based on the existing problems, measures are to be taken to develop the religious sector. The measures include the enhancement of spiritual awareness and resilience of the religious people in support of the tourism in Bali based on Hinduist teaching. Efforts should also be made to develop infrastructure for religious life and continue and promote surveys on the aspects of Hinduist religious teaching. Upgrading on religious affairs should be held. Religious books, bulletins, and other publication on religious activities should be made available for Hinduists, Buddhists, Moslems and Christians (Protestants and Catholics). The Institute of Hindu Dharma is to be made state-owned. The Hinduist Court Office and the Office of Hinduist Religious Affairs should be provided at subdistricts.

2. Education

Before the modern education system was introduced in Bali, the traditional education system based on local customs had been used to educate the Balinese children. In addition, other traditional education systems particularly those used to improve the children's skills had been applied. This type of education is intended to train the children to earn a living and meet their social needs.

The dominant type of education used to be that dealing with religion and matters related to royal life. They were taught by the Brahmanas (priests).

After the western education system was introduced, the government opened a lower school called the Tweede Klasse school that was intended to train clerical workers.

Owing to the shortage of schools, many of the students continued their study in Java.

The traditional system of education in Bali has generally been oriented to Hinduist religious values dealing with phylosophy, ethics and other required knowledge. Thus the traditional education system was integrated in family education.

Karena dengan taatnya pada peraturan ini tidak akan ada ijon yang bisa mencekek para petani.

Kendatipun telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan dalam pembinaan dan pemberian bimbingan terhadap kehidupan beragama sesuai dengan kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh dalam Repelita III, namun masih dialami adanya permasalahan pokok yang perlu dipecahkan. Seperti misalnya masalah pengetahuan praktis dan populer tentang isi ajaran agama dan adat istiadat Bali, demikian pula tafsir terhadap aspek-aspek ajaran agama Hindu. Banyaknya permintaan dari umat Hindu di luar Bali (daerah transmigrasi) untuk memperoleh bantuan-bantuan berupa tuntutan ajaran agama Hindu dan untuk membangun pura. Dirasakan adanya pembentukan Kantor Peradilan Agama Hindu dan Kantor Urusan Agama Hindu tingkat Kecamatan dan lain-lain.

Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan yang ada maka perlu dibuat langkah-langkah kebijaksanaan untuk dapat lebih berkembangnya pembangunan bangsa di sektor agama. Adapun langkah tersebut adalah antara lain : mengembangkan dan membina kesadaran dan ketahanan mental spiritual umat beragama dalam menunjang pariwisata budaya Bali yang berlandaskan dan dijiwai ajaran agama Hindu. Diusahakan pula pengembangan prasarana/sarana kehidupan beragama dan melanjutkan serta meningkatkan penelitian terhadap aspek-aspek agama Hindu. Menyelenggarakan upgrading/penyuluhan agama, penerbitan buku agama, buletin dan bantuan kegiatan keagamaan untuk agama Hindu/Budha, Islam, Kristen (Protestan dan Katholik). Mengusahakan penegerian Institut Hindu Dharma. Mengusahakan adanya Peradilan Agama Hindu dan Kantor Urusan Agama Hindu Kecamatan.

2. Pendidikan

Sebelum sistem pendidikan modern masuk ke Bali, pendidikan secara tradisionallah yang banyak berperan untuk mendewasakan anak atas dasar kebiasaan-kebiasaan setempat. Disamping itu masih banyak pula pendidikan tradisional lainnya terutama pendidikan yang diberikan dengan tujuan untuk menambah kecekatan dan keterampilan anak-anak. Pendidikan seperti ini dimaksud agar mereka dapat mencari nafkah dan memenuhi keperluannya dalam masyarakat.

Pendidikan yang menonjol pada waktu itu adalah pendidikan keagamaan dan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kerajaan. Orang-orang memberikan pelajaran adalah orang-orang Brahmana.

Kemudian setelah masuknya sistem pendidikan Barat ke Bali maka untuk kepentingan tenaga administrasi, pemerintah membuka sekolah rendah yang bernama **Tweede Klasse School.**

Karena kurangnya sekolah di Bali, Banyak dikalangan murid-murid pada waktu itu melanjutkan pelajarannya ke Jawa.

Pendidikan secara tradisional di Bali sebagian besar diwarnai oleh nilai-nilai agama Hindu yang mencakup bidang filsafat dan etika dan lain-lain ilmu pengetahuan yang diperlukan. Demikianlah sistem pendidikan tradisional boleh dikatakan telah luluh melalui pendidikan keluarga sesuai dengan dharmanya masing-masing.

a. Pendidikan Dasar

Sekolah Taman Kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan awal sebelum masuk bangku Sekolah Dasar di Bali ada sebanyak 450 buah diantaranya 2 buah negeri dan selebihnya swasta, sedangkan jumlah tenaga pengajar seluruhnya sebanyak 1297 orang.

Sampai akhir tahun 1985 jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di Bali 2691 buah yang terdiri dari 2624 SD Negeri dan 67 SD Swasta. Sedangkan jumlah murid ada sebanyak 450.491 orang. Sesuai dengan keadaan dan jumlah sekolah yang ada di Bali daya tampung bagi anak-anak yang ingin masuk Sekolah Dasar telah terjangkau sepenuhnya. Lihat Tabel IV-2.

Sebagai contoh pada tahun ajaran 1983/1984 dari 51.471 orang anak yang mendaftar masuk SD, ada 51.465 orang yang diterima.

Selain dari pada Sekolah Dasar masih terdapat pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sarana dan prasarana pendidikan untuk menampung anak-anak yang tuna sampai saat ini sudah ada 11 buah SLB antara lain 1 buah SLB Pembina dan 10 buah SDLB biasa, baik negeri maupun swasta. Tapi pada umumnya sarana dan prasarananya belum sempurna sesuai dengan keperluan dan persyaratan, terutama SDLB di Kabupaten Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem.

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Sampai akhir Pelita III jumlah gedung Sekolah Lanjutan tingkat Pertama yang ada sebanyak 350 buah dengan jumlah ruang kelas sekitar 1906 buah dengan perincian 950 ruang milik Negeri dan 956 ruang milik Swasta. Dalam Tabel IV - 3 berikut ini tergambar perkembangan jumlah sekolah, murid dan guru sejak tahun 1981 - 1985. Sampai tahun

a. Basic Education

There are 450 kindergartens, two of which belong to the government and the others are privately-owned. These schools employ 1,297 teachers.

Up to 1985 there had been 2,691 Primary Schools consisting of 2,624 State Primary Schools and 67 Private Primary Schools. There were 450,491 primary school students. The total number of primary schools was enough to accomodate the children who needed basic education. (Table IV-2).

Tabel / ***Table IV — 2***

PERKEMBANGAN SEKOLAH DASAR 1981 - 1985 DI BALI
THE GROWTH OF PRIMARY SCHOOLS IN BALI FROM 1981 - 1985

No.	Tahun *Year*	Jumlah Sekolah *No of Schools*	Jumlah Murid *No of Students*	Jumlah Guru *No of Teachers*
1.	1981	2,084	453,192	11.725
2.	1982	2,475	531,401	17.089
3.	1983	2,637	470,570	19.147
4.	1984	2,284	467,148	20.257
5.	1985	2,691	450,491	20.543

Sumber Dinas PDAK Prop. Bali Statistik Sekolah Dasar
Source : Division of Education and Culture of the Bali Province. Statistic of Primary Schools

As an example, during the school year of 1983/1984 51,465 out of 51,471 children who wished to enter primary schools were admitted.

In addition to the primary school, there were schools for handicapped children. There are 11 school buildings including 1 Model school and 10 State and private ordinary schools for handicapped children. However, the facilities available in the schools, particularly those in Jembrana, Gianyar, Bangli, Klungkung, and Karangasem regencies do not meet the requirements yet.

b. Junior Secondary Schools

Up to the end of Pelita III there have been 350 Junior Secondary School buildings with 1,906 classrooms, 950 of which belong to the government and 956 to the private sector. The following table shows the growth of schools, students and teachers from 1981-1985. Up to 1985 there have been 389 schools with 151,727 students and 11,864 teachers.

To enhance the quality of education during Repelita III the following activities have been carried out.

(1) training for teachers/school principals on Indonesian, English, Physics, Social Science, Specific Skills, Mathematics, School Resilience, the Pancasila education.
(2) procuring school facilities including physical laboratory, musical instrument, visual aids, facilities for specific skills, and libraries.
(3) The facilities provided during Pelita III particularly those for private schools are more than adequate.

c. Senior High Schools

The growth rate of education in Bali for a period of five years (1981-1985) reaches 0.12%.

Up to the end of Pelita III there have been 128 Senior High Schools including 18 state senior high schools and 110 private senior high schools with 769 classrooms. There are also 36 vocational schools including high schools for economics, technical high schools, industrial schools, and the like, with 294 classrooms, 497 teachers and 8,712 students. Besides, there are 10 teachers training schools and 2 sports teachers schools with 107 classrooms and 4,553 students.

In 1981 there were 136 senior high schools with 47,071 students and 3,855 teachers. In 1985 the total of senior high schools reached 210 with 87,793 students and 6,969 teachers. Table IV-4.

The problems of developing the quality of education in the Junior and Senior Secondary Schools include the shortage of classrooms to accomodate the ever-increasing number of primary school graduates, practice instruments and laboratory equipments as well as text-books. The majority of schools have not been equipped with library equipments required to enhance the quality of education. Also, the limited fund makes it difficult to find space for school buildings.

d. Higher Education

The higher education in Bali is still limited in number. There are 13 higher learning institutions, including 2 state-owned ones, i.e. UNUD (University of Udayana) and ASTI (Indonesian Academy of Choreography) and 11 registered private institutions. The IHD (Institute of Hindu Dharma) is the only Hinduism-oriented instituion of higher learning in Bali.

1985 jumlah sekolah tercatat sebanyak 389 dengan jumlah murid 151.727 orang dan guru 11.864 orang. Lihat Tabel IV-3.

Kemudian, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di SLTP sejak Pelita III telah dilakukan kegiatan antara lain :

(1). Penataran Guru/Kepala Sekolah dalam bidang Studi Bahasa Indonesia, Inggris, IPA, IPS, Keterampilan, Matematika, BP dan ketahanan Sekolah Kursus PMP.
(2). Pengadaan sarana pendidikan seperti laboratorium IPA dan peralatannya, Orkes, alat peraga matematika, fasilitas keterampilan, buku-buku perpustakaan beserta perabotannya.
(3). Jumlah sarana pendidikan yang diberikan selama Pelita III, jika dibandingkan dengan jumlah sekolah dan jumlah murid yang ada. menggambarkan keadaan sarana pendidikan masih jauh dari mencukupi, lebih-lebih pada sekolah swasta.

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Perkembangan pendidikan selama lima tahun (1981 s/d 1985) di Bali mengalami peningkatan sekitar 0,12%.

Untuk SMA saja sampai akhir Pelita III mencapai 128 buah (negeri 18 dan swasta 110 buah) dengan sekitar 769 ruang kelas. Sementara itu jumlah sekolah kejuruan yang ada di Bali ada sekitar 36 buah seperti SMEA, STM, SMKI, SMIK dan lain-lain. Jumlah ruang kelasnya mencapai 294 buah, jumlah tenaga pengajar 497 orang dengan jumlah murid 8712 orang. Selain itu masih ada 10 buah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 2 SGO. Jumlah ruang kelas 107 buah dengan jumlah murid 4553 orang.

Jika pada tahun 1981 jumlah sekolah SLTA di Bali seluruhnya ada 136 buah dengan murid 47.071 orang dan guru 3.855 orang maka pada tahun 1985 sudah mencapai 210 sekolah dengan murid 87.793 orang, dan 6.969 guru. Lihat Tabel IV-4.

Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pengembangan mutu dan peningkatan pelayanan untuk Sekolah Lanjutan Pertama dan Atas antara lain menyangkut kurangnya ruang belajar untuk menampung lulusan tingkat lebih bawah yang makin meningkat. Peralatan praktek maupun laboratorium dan keterampilan masih kurang. Penyebaran buku-buku mata pelajaran pokok dan kejuruan belum tersebar merata. Sebahagian besar sekolah-sekolah belum mempunyai perpustakaan yang lengkap sesuai dengan keperluan pengembangan pendidikan. Sulitnya memperoleh tanah bagi proyek-proyek pembangunan sekolah atau perluasan areal karena biaya yang tersedia tidak memadai.

d. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tingkat tinggi di Bali masih terbatas di banding dengan kenyataan bahwa lulusan SLTA yang ada semakin meningkat, sedangkan perguruan tinggi yang ada sampai saat ini sebanyak 13 buah (2 buah negeri yaitu UNUD dan ASTI) dan 11 buah swasta yang berstatus terdaftar. Institut Hindu Dharma (IHD) tergolong satu-satunya lembaga pendidikan tinggi Agama Hindu di Bali.

Universitas Udayana berdiri pada tanggal 19 Agustus 1962 yang mulanya dengan 4 fakultas yaitu : Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian secara bertahap dilengkapi dengan beberapa fakultas lagi seperti : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi. (Tabel IV-5). Sampai akhir Pelita III jumlah mahasiswa Unud seluruhnya 13.800 orang dengan jumlah tenaga edukatif 862 orang dan tenaga administratif 650 orang.

Beberapa universitas swasta yang ada di Bali : Universitas Marhaen (sekarang Mahendratta), didirikan pada tahun 1963 mempunyai 2 fakultas yaitu : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan Fakultas Hukum. Universitas Ngurah Rai dengan 4 fakultas yaitu : Ilmu Sosial dan Politik, Ekonomi, Hukum, Teknik dengan jumlah mahasiswa 2.415 orang. Universitas Mahasaraswati dengan fakultas yang ada ialah : Pertanian, Hukum, Ekonomi, Teknik dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jumlah mahasiswa seluruhnya 2.643 orang.

Universitas Pendidikan Nasional dengan fakultas yang ada sebanyak 4 buah : Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Teknik. Universitas Bali dengan fakultas Ekonomi, Pertanian, Teknik. Universitas Dwijendra dengan fakultas sebanyak 4 buah yaitu : Teknik, Pertanian, Ilmu Komunikasi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Universitas Tabanan dengan fakultas Pertanian, Ekonomi dan Hukum. Institut Hindu Dharma dengan tiga fakultas yaitu : Fakultas Filsafat, Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Sastra dengan jumlah mahasiswa 1.288 orang. Lihat Tabel IV-5.

Tabel / *Table IV — 3*

BANYAKNYA SLTP, MURID, GURU SEJAK TAHUN 1981 - 1985
TOTAL NUMBER OF JUNIOR SECONDARY SCHOOLS, STUDENTS, TEACHERS FROM 1981 — 1985

No.	Tahun *Year*	Jumlah Sekolah *Schools*	Jumlah Murid *Students*	Jumlah Guru *Teachers*
1.	1981	291	93.667	7.239
2.	1982	317	112.312	7.228
3.	1983	350	119.379	9.405
4.	1984	369	140.042	11.036
5.	1985	386	150.770	11.669

Sumber : Depdikbud Propinsi Bali
Source : Provincial Office of the Department of Education and Culture in Bali.

Tabel / *Table IV — 4*

BANYAKNYA SEKOLAH LANJUTAN ATAS, MURID, GURU TAHUN 1981 — 1985
NUMBER OF SENIOR HIGH SCHOOLS, STUDENTS AND TEACHER

No.	Tahun *Year*	Jumlah Sekolah *Number of Schools Schools*	Jumlah Murid *Number of Students*	Jumlah Guru *Number of Teachers*
1.	1981	132	46.481	3.614
2.	1982	148	57.562	4.186
3.	1983	174	63.149	5.550
4.	1984	188	74.482	6.214
5.	1985	205	86.185	6.703

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Bali.
Source : Regional Office of the Ministry of Education and Culture, Bali Province.

The University of Udayana, founded on 19 August 1962 had originally 4 faculties, i.e. Faculty of Letters, faculty of Medicines, Faculty of Veterinary and Faculty of Teachers Training and Education. More Faculties have been opened, including Faculty of Law and Social Sciences, Faculty of Engineering, Faculty of Agriculture, Faculty of Economics. See Table IV-5. Up to the end of Pelita III, the total number of students of UNUD reached 13,800 with 862 educative staff members and 650 administrative staff members.

Private higher learning institutes in Bali include University of Marhaen (Mahendratta) founded in 1963 with two Faculties, i.e. Faculty of Social and Political Sciences and Faculty of Law; Ngurah Rai University with 4 Faculties, i.e. Social and Political Sciences, Economics, Law and Engineering with a total of 2,415 students; University of Mahasaraswati with the following faculties; Agriculture, Law, Economics, Engineering, Teachers Training and Education, with a total of 2,643 students; National University with 4 faculties; Economics, Law, Social and Political Sciences, Engineering; Bali University with Faculties of Economics, Agriculture, Engineering; University of Dwijendra with 4 faculties; Engineering, Agriculture, Communications, Teachers Training and Education; University of Tabanan with faculties of Agriculture, Economics, and Law; Institute of Hindu Dharma with 3 faculties : Philosophy, Teachers Training and Education, and Letters, with a total of 1,288 students. See Table IV-5.

e. Informal Education

The main targets of informal education are those who have never benefitted from formal education (illiterates), school drop-outs and those who can not continue their education. According to available data, the number of school-age children who did not find the opportunity for formal education at the end of Pelita III was 18,028 persons and drop-outs 51,784 persons (primary school drop-outs 42,759; junior schools 5,407 and senior school 3,618).

Within the framework of overcoming the problems, various vocational trainings have been undertaken. These efforts are necessarily escalated in the future to cover the whole regions of Bali.

For the promotion of technical personnel, special courses have been organized for informal education officials.

A sizable number of people aged 10 years or above are still illiterates. Meanwhile the existing infrastructures and facilities fall short of the real need. To solve some of the problems of droup-outs, a speial primary school in Gianyar District and Parcel A study groups have been established.

e. *Pendidikan Masyarakat*

Sasaran utama pendidikan masyarakat adalah kepada mereka-mereka yang tidak pernah menikmati pendidikan di bangku sekolah (buta huruf), anak putus sekolah (drop out) ataupun mereka yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi. Adapun jumlah anak yang belum pernah sekolah umur (7 - 12 tahun), menurut catatan pada akhir Pelita III mencapai 18.028 orang. Dan anak putus sekolah (drop out) 51.784 orang yang meliputi SD : 42.759 orang; SMTP: 5.407 orang dan SMTA : 3.618 orang.

Dalam rangka menanggulangi hal-hal tersebut telah diadakan berbagai macam kursus keterampilan, di mana hal ini untuk tahun-tahun yang akan datang perlu lebih ditingkatkan dan diperluas sehingga menjangkau semua daerah di Bali.

Dalam rangka meningkatkan tenaga-tenaga teknis telah pula dilaksanakan kegiatan penataran kasi/penilik pendidikan masyarakat.

Banyak penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih buta huruf.

Sarana dan prasarana SKB masih kurang memadai dengan keperluan.

Dalam menuntaskan anak yang sekolah telah dikembangkan SD pamong di Kabupaten Gianyar dan Kejar paket A.

3. Pemuda dan Olahraga

Dalam proses historis pada masa Orde Baru ini pemuda-pemuda diwadahkan dalam satu wadah yaitu KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1973 mencakup seluruh wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Di Bali peranan KNPI dalam pembinaan generasi muda diarahkan kepada usaha pengembangan kepemimpinan dan ketenagaan yang meliputi : latihan pemuda tingkat perintis, latihan pemuda tingkat pemuka dan latihan pemuda tingkat penuntun, pembina kegiatan Osis, temukarya siswa, pendidikan politik bagi Generasi Muda, Studi Komunikasi pemuda, pertukaran pemuda antar propinsi, pertukaran pemuda antar negara.

Selain itu juga di Bali diadakan pembinaan dan pengembangan keterampilan dan daya kreasi Generasi Muda yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain : kelompok kerja produktif, Pembinaan kelompok minat pemuda, Pembinaan purna paskloraka caraka muda, Perkembangan kerja pemuda.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda yang selama ini dilaksanakan didasarkan atas langkah-langkah kebijaksanaan antara lain; Pendinamisan kegiatan pemuda yang telah melembaga dikalangan masyarakat yakni lewat organisasi tradisional. seperti sekehe teruna-teruni. Penampungan dan penyaluran kreativitas pemuda yang ada, Pembentukan daya kreasi dan keterampilan bagi para pemuda untuk ikut serta aktif dalam pembangunan, Pembinaan jiwa pemuda kearah terdapatnya satu penumbuhan patriotisme, persatuan dan kesatuan bangsa, Partisipasi dalam pembangunan, Masalah untuk mendapat kesempatan menikmati pendidikan.

Selain KNPI wadah kepemudaan yang selama ini sangat penting peranannya di Bali ialah Kepramukaan.

Pada saat sekarang Gerakan Pramuka di Bali memiliki 8 Kwarcab, 51 Kwarpan, dengan jumlah Siaga 69.672, Penggalang 46.360, Penegak/Pendega 5.363 orang dan Pembina 3.630 orang. Tetapi melihat perkembangan yang dicapai selama Repelita III agaknya masih perlu upaya peningkatan diberbagai bidang seperti; Organisasi, Masalah Pembinaan, Masalah anak didik, Masalah sarana/prasarana.

Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk dapat meningkatkan aktivitas dan kegunaan kepramukaan antara lain : Perbaikan aparatur kerja, Peningkatan mutu pembinaan dan pelatih untuk dapat mengelola gugus depan secara baik.

Selama ini telah dibangun dan ditingkatkan fungsi Sanggar Bhakti, Kwarda, Kwarcab, pembangunan camping Ground dan Lembaga Cadika. Juga peningkatan mutu pembina/pelatih dan Penegak/Pendega.

Dalam PON X Bali meraih 25 medali (perorangan dan beregu) terdiri dari 8 emas, 4 perak dan 13 perunggu dan menduduki rangking ke-11.

Bali mempunyai atlet yang secara perorangan berprestasi dalam berbagai cabang olahraga, tetapi belum dapat ditingkatkan secara maksimal karena terbatasnya pembinaan yang baik, akibat sarana, dana serta pelatih yang kurang memadai.

Untuk meningkatkan prestasi dibidang keolahragaan diperlukan pembinaan secara intensif dan ekstensif.

Pembinaan Olahraga di Bali dilakukan melalui beberapa jalur yaitu :

1. Jalur Pelajar.
   Dari tingkat SD, SMTP dan SMTA.
   Dalam pembinaannya jalur pelajar dilakukan dengan 2 cara :
   a. Olahraga Pendidikan yaitu dilakukan pada jam-jam pelajaran berdasarkan kurikulum.

Tabel / *Table IV — 5*

JUMLAH PERGURUAN TINGGI, STATUS 1984/1985
NUMBER OF HIGHER LEARNING INSTITUTES AND RESPECTIVE STATUS, 1984/1985

No.	Nama Perguruan Tinggi *Institute*	Status *Status*	Dosen *Educatif Staff*	Mahasiswa *Students*
1.	Universitas Udayana *University of Udayana*	Negeri *Public*	860	13.087
2.	Akademi Seni Tari Indonesia *Academy of Choreography*	Negeri *Public*	57	246
3.	Universitas Mahendratta (Marhaen) *University of Mahendratta*	Swasta *Private*	41	552
4.	Institut Hindu Dharma (IHD) *Institute of Hindu Dharma*	Swasta *Private*	77	1.715
5.	Universitas Ngurah Rai *Ngurah Rai University*	Swasta *Private*	158	2.224
6.	Universitas Mahasaraswati *University of Mahasaraswati*	Swasta *Private*	288	4.439
7.	Universitas Tabanan *University of Tabanan*	Swasta	99	355
8.	Universitas Bali *Bali University*	Swasta *Private*	129	308
9.	Universitas Dwijendra *University of Dwijendra*	Swasta	162	285
10.	Universitas Pendidikan Nasional *National University*	Swasta *Private*	119	2.024
11.	ASMI *Academy of Secretariat and Management*	Swasta *Private*	63	537
12.	Akademi Perhotelan Pariwisata *Academy of Hotelry and Tourism*	Swasta *Private*	48	247
13.	AAN Wirabakti *Academy of Administration Wirabakti*	Swasta *Private*	28	387
14.	Akademi Pendidikan Guru *Academy of Teachers Training*	Swasta *Private*	39	576

3. Promotion of the Younger Generation and Sports

In the historical process of the New Order Era, youths are united in one organizational structure, i.e. the National Committee of Indonesian Youths founded in Jakarta on 23 July 1973 with a nation-wide scope. In Bali, the role of the Committee in the promotion of the younger generation is directed to efforts for the development of manpower and leadership covering basic, intermediate and higher levels of youth trainings, promotion of students extra-curricular activities, students meetings, political education for the younger generation, communication study, inter-province youth exchanges and international youth exchanges.

Besides, attempts have also been launched in Bali for the promotion and development of vocational skills and creativity of the younger generation, covering -- among others -- the activities of : productive work groups, promotion of youth interest groups, promotion of youth's purna paskloraka and development of youth's activities.

Promotion and development of the younger generation pursued thus far are based on the following policies : dynamization of youth's activities through existing traditional organizations such as the sekehe taruna-taruni, accommodation and mobilization of youth's creativities, development of youth creativities and vocational skills to promote active participation in development activities, promotion of youth's spirit toward the fostering of patriotism, nationalism and national unity, participation in development activities and opportunity to enjoy education.

Besides the National Committee of Indonesian Youth, the Pramuka Scouts Movement also plays an important role for the promotion of the younger generation in Bali.

At present, the Pramuka Movement in Bali has 8 branch quarters and 51 sub-branch quarters with 69,672 Siaga scouts, 46,360 Penggalang scouts, 5,363 Penegak/Pendega scouts and 3,630 Pembina scouts. However, in review of the results achieved during Pelita III, there are still rooms for improvement in various aspects such as organization, promotion, education and infrastructure/facilities.

The policies and steps need to be pursued for the promotion of activities and use of the Pramuka Movement include personnel upgrading, improvement of the quality of promotion and trainers in order to be able to better manage the scouts in general.

Thus far works have been carried out for the establishment and functional promotion of the Sanggar Bhakti Community Services, Regional

b. Olahraga Karya yaitu dilakukan bagi pelajar-pelajar yang berbakat dalam salah satu cabang olahraga, pelaksanaannya di luar jam pelajaran (extra kurikuler).

2. Jalur Mahasiswa
Pembinaannya dilakukan oleh Senat Mahasiswa atau perkumpulan olahraga mahasiswa, kecuali bagi fakultas tertentu.
3. Jalur Karyawan
Pembinaannya ditentukan dan dilakukan oleh karyawan Instansi Pemerintah maupun Swasta, ABRI maupun Sipil.
4. Jalur Masyarakat
Pembinaan olahraga dilakukan terhadap masyarakat umum melalui organisasi pemuda, wanita, organisasi profesi, banjar-banjar dan desa.

Adapun jenis olahraga yang dikembangkan di Bali ada tiga kelompok :

1. Olahraga Tradisional
2. Olahraga Prestasi
3. Olahraga Pariwisata

Olahraga Pariwisata yaitu berkaitan dengan Pulau Bali sebagai obyek Pariwisata untuk menarik kegairahan para wisatawan ke pulau Bali. Oleh karena itu dikembangkan olahraga pariwisata seperti bersilancar (surfing), penyelamat pantai (life saving), silancar angin (wind surfing) dan menyelam (diving).

Dalam meningkatkan olahrga sebagai salah satu unsur pembangunan, Bali telah membuat program-program sebagai berikut :

a. Meningkatkan program kesegaran jasmani dan frekwensi pertandingan olahraga dari tingkat antar kelas, antar sekolah, Popsi Kecamatan, Kabupaten dan Popsi Propinsi.
b. Mengadakan pertandingan olahraga massal bagi karyawan dan masyarakat umum pada hari-hari Nasional.
c. Memberikan bantuan alat-alat olahraga ke Desa-desa di Bali.
d. Membuat gedung olahraga di tiap-tiap Kabupaten dan lapangan umum untuk segala kegiatan olahraga seperti atletik, lapangan basket, volly dan lain-lain.
e. Mengadakan pelatih dan mengelola olahraga yang baru, penataran pelatih guru olahraga kepada sekolah swasta.
f. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi lewat pendekatan ilmiah dan pendekatan lain.
g. Mengikuti event-event keolahragaan yang bersifat nasional.
h. Menyelenggarakan pertandingan antara Daerah/Propinsi.
i. Menyiapkan media penerbitan dan melaksanakan pembinaan pembibitan dengan sebaik-baiknya.

Walaupun kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang olahraga telah banyak dilakukan, tapi bila dibandingkan dengan populasi yang dimasalkan, sarana dan prasarana olahraga belum juga memadai. Untuk itu perlu ditingkatkan terus dalam tahun-tahun yang akan datang.

Sektor Kebudayaan

Bali sebagai Pusat Pariwisata Indonesia Bagian Tengah memiliki berbagai potensi yang menunjang pertumbuhan kepariwisataan di Bali. Pembangunan Kebudayaan mempunyai sasaran untuk memberi landasan yang lebih kuat bagi pengembangan Pariwisata Budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Kebijaksanaan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan sedapat mungkin diarahkan kepada pertumbuhan dan pemupukan watak yang mencerminkan ciri khas kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila. Pembangunan Kebudayaan Daerah adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Kebudayaan Nasional dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

Sesuai dengan tahap pembangunan dan prioritas yang telah ditetapkan selama Pelita III maka sasaran-sasaran pembangunan kebudayaan Daerah Bali yang telah berhasil diwujudkan antara lain sebagai berikut:

Pelaksanaan kebijaksanaan dalam pembangunan kepurbakalaan, kesejarahan dan permuseuman dalam tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat Repelita III di Bali telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi; Pemugaran dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala, seperti : Pemugaran Pura Besakih, Pura Mengening dan pemugaran Pura Taman Ayun.

Pengembangan Permuseuman Bali dilaksanakan dengan pengadaan koleksi, fungsionalisasi museum, perawatan. Museum, Pameran Khusus, pameran keliling. Bantuan Museum Daerah, rehabilitasi Museum dan sebagainya.

Pengembangan kesenian meliputi kegiatan pembinaan kesenian rakyat, pengendalian dan pengembangan kesenian Tingkat Propinsi antara lain Kegiatan Sanggar Lomba Seni, kegiatan pelestarian penyebarluasan kesenian seperti : Pameran duta seni, festival, peningkatan wawasan seni di kalangan masyarakat dan pengadaan sarana/prasarana penunjang.

Quarters, Branch Quarters, Camping Ground and Training Centres in addition to quality improvement of promotion and trainers as well as supervisors.

In the Tenth National Sports Week (PON X) Bali won 25 medals, comprising of 8 golds, 4 silvers and 13 bronzes, placing the Province in the eleventh rank.

Bali has individual athletes with great potentials in various types of sports. But the achievement has not been maximum due to lack of ideal promotion, facilities, fund and trainers.

The promotion of sports achievement requires intensive and extensive promotion. In Bali, it is endeavoured through a number of channels, i.e. :

1. The Students (of primary, junior and senior high schools). Promotion through this channel is undertaken in 2 ways :
   a. Educational sports, according to curriculum.
   b. Achievement-oriented sports, for students with promising potentials (extra-curricular activities).
2. University Students
   Promotion activities are managed by students Senates or sports clubs, except for certain schools.
3. Employees
   Promotion activities are managed by personnel of Government offices, private institutions as well as the Armed Forces.
4. The Community
   Sports promotion is carried out upon the public through organizations of youth, women, professions, villages.

The types of sports promoted in Bali are classified into three groups :

1. Traditional sports
2. Achievement-oriented sports
3. Tourism sports.

The tourism sports are related with the position of Bali as an object of tourism. They include surfing, live-saving, wind surfing and diving.

The promotion of sports as one of the elements of development in Bali covers the following programmes :

a. Promotion of physical fitness programmes and the frequency of sports contests among students in school, subdistrict, district and provincial levels.
b. Organizing mass sports contests among workers and the public in National Days commemorations.
c. Provision of sports equipments to villages.
d. Construction of sports halls and sports fields.
e. Acquisition of trainers and managers of new sports, refresher courses for sports teachers, including teachers of private schools.
f. Promotion and development of sports achievement through scientific and other approaches.
g. Participation in national sports events.
h. Organizing provincial/inter-region sports contests.
i. Organizing publication medium and talent-scouting.

Culture

As a centre of tourism in Central Indonesia Bali has great potentials in support of tourism. The cultural development in Bali has the target of fostering a stronger foundation for the promotion of Cultural Tourism inspired by the Hindu Religion. The policies of cultural promotion and development are directed as best as possible to the fostering of characters reflecting the national identity based on Pancasila. The development of regional culture constitutes an integral part of the National Culture Development to enrich the colourful national culture.

In accordance with development phase and priorities of Pelita III, the targets of regional culture development in Bali had been fulfilled. Development activities of archeology, history and musea in Bali during the first four years of Pelita III included restoration and maintenance of historical and archeological relics such as the restoration of Pura (temple) Besakih, Pura Mengening and Pura Taman Ayun.

Museum development in Bali covered increase of collection, museum functionalization, maintenance, exhibitions, mobile exhibitions and the likes.

Art development comprised of promotion of traditional arts, supervision and development of art at provincial level such as art contests, art preservation and socialization such as exhibition, festivals, promotion of art appreciation among the public and provision of supporting infrastructures/facilities.

Inventory-taking and documentation of regional cultures in Bali were recording activities, analysis and composition of manuscripts for 6 aspects of culture, i.e. history, customs, folklore, children's games, cultural geography and traditional architecture.

Studies on archeology in Bali included research activities on pre-history classic archeology, Islamic archeology, paleo-anthropology, paleo-archeology radiometry and provision of laboratory equipments.

Researches on Indonesian and Balinese languages and literatures covered the activities of review on modern Balinese poems, mastery of Indonesian language in Teachers Training schools, dialect geography in Klungkung District, morphology system and characters of Balinese language.







Bali sebagai Pusat Pariwisata Indonesia bagian Tengah memiliki berbagai potensi seni dan budaya yang tinggi nilainya. Beberapa jenis seni tari oleh Pemda melalui aparat tehnisnya, terus dikembangkan dan dilestarikan. Kemampuan pengorganisasian dan pengelolaan pusat-pusat budaya Bali semakin mantap dan dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pelayanan budaya.

As a tourist centre in the Central Indonesia's territory, Bali Island has an advanced art and cultural potential. The local cultural agency always takes part in the promotion of some popular dances beside providing upgrading course on the organization and management of a cultural centre.






Aneka tipe dan bentuk bangunan bergaya tradisional dengan arsitektur yang indah tumbuh di hampir setiap penjuru kota di Bali. Sebagai daerah wisata, tumbuh dan berkembangnya bangunan serupa itu bahkan semakin mendukung keindahan Bali. Seni bangunan dengan polesan pengaruh keagamaan dan budaya Hindu/Budha terasa menjadi bagian yang kuat sebagai khas Bali. Disamping beberapa contoh dalam gambar ini, masih banyak lagi gedung dan bangunan khas Bali bertebaran di daerah ini.

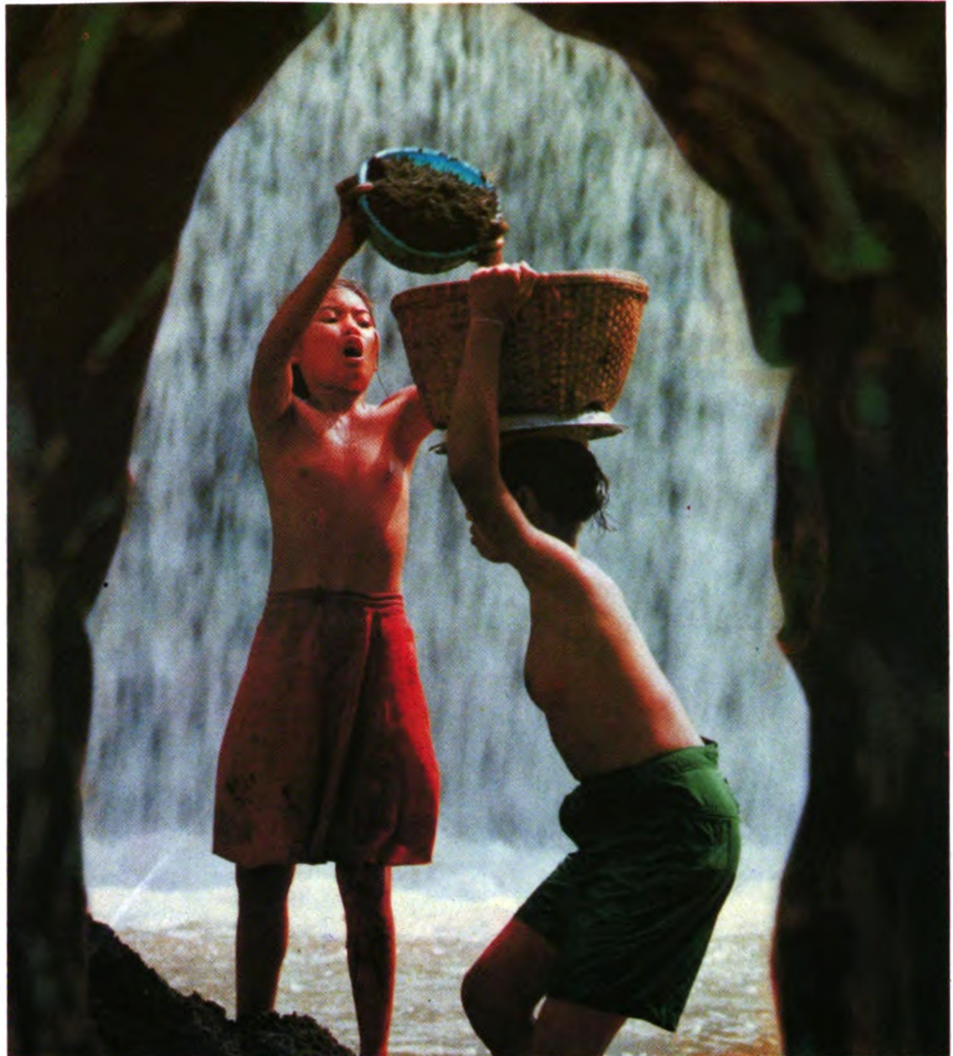
More modern buildings with the traditional architecture are found in the entire corners of Bali. As is known, the influence of the Hindu/Buddhist culture is prominent in Balinese architecture. Seen in the picture Bali-modelled buildings scattered throughout this region.






Nampak dua remaja putri sedang mengangkut pasir. Di Bali, anak seusia mereka sejak kecil sudah mulai dilatih hidup mandiri, meskipun tugas utamanya sekolah. Dengan konsep demikian, diharapkan kelak setelah dewasa, mereka tak ragu lagi menjadi manusia yang siap dengan kemandiriannya. Gambar bawah, beberapa bendungan, yang manfaatnya besar untuk mendukung sektor pertanian. Pembangunan sektor ini juga banyak mendukung sektor ketenagakerjaan.

Two young girls carrying the sand sack, their part-time jobs after school hour. Since early age the Balinese children have helped their parents in household activities in order to enable them to earn their own living in the future. The picture below shows a number of dams to support the agricultural sector.













Anak-anak seusia mereka mutlak perlu mendapatkan pendidikan secara intensif. Di Bali, kelompok umur mereka ini umumnya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar. Mereka kini sedang asyik dengan dunianya, dunia pendidikan. Kehidupan yang maha luas membentang di hadapan mereka, menunggu kehadiran mereka. Diantara generasi muda seperti ini akan muncul Pemimpin-pemimpin bangsa yang sejak dini harus dibekali dengan ilmu. Pemerintah hanya memberikan dorongan dan menyediakan fasilitas beserta kemudahannya.

The Local Government of Bali has provided school facilities for the school-age children. More elementary schools have been constructed and more school-age children have been accomodated. The present young generation will be the leaders of tomorrow; so it is necessary to provide them with adequate education.

Pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan dan keolahragaan di Bali berjalan seiring dengan pembangunan bidang lainnya. Dinamika pembangunan sektor ini tergambar pada foto di halaman ini. Pentas budaya, senam, seni drum band dan kegiatan kepramukaan. Masing-masing berkembang dengan konsep yang telah digariskan.

Development in the sector of education, culture and other sectors have been conducted according to valid policies. The development activities in this field can be seen in the pictures on this page such as the cultural performance, gymnastics and the drum band display by the local boyscouts.

















Keindahan yang alami, merupakan daya tarik Bali secara khusus. Kenyataan ini menyebabkan Bali mendapat julukan "Nusa Ning Nusa", "Puncakening Geli" oleh Gajahmada. Juga julukan "Youck Hollands" oleh Cornellis de Houtman pada tahun 1597 ketika berkunjung ke sana. Inilah sebagian dari Bali yang teramat kaya akan keindahan alam.

The beautiful scenery in Bali has really impressed visitors. That's why the King Gajah mada called this island "Nusa ning Nusa" and "Puncake ning Geli". During his visit to Bali in 1597 Mr Cornellis de Houtman called this island as the "Youck Hollands". This is the natural beauty of Bali which is full of places of interest.







Inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan Daerah Bali, meliputi kegiatan perekaman, penganalisaan dan penyusunan naskah 6 (enam) aspek kebudayaan daerah yaitu : sejarah daerah, adat istiadat daerah, ungkapan rakyat daerah, permainan rakyat (anak-anak), geografi budaya daerah arsitektur tradisional.

Penelitian Purbakala Bali, meliputi kegiatan penelitian pra sejarah arkeologi klasik, arkeologi Islam, Paleoantropologi, palio arkeologi radio metri dan sarana perlengkapan gedung laboratorium.

Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali meliputi kegiatan yaitu : Telaah Puisi Bali Modern, Kemampuan Berbahasa Indonesia SPG di Bali, Geografi Dialek Bahasa di Kabupaten Klungkung, sistem Morfologi sifat Bahasa Bali.

Pengembangan di Bali, meliputi kegiatan pengadaan buku pustaka berbahasa Indonesia dan berbahasa asing perpustakaan wilayah dan perpustakaan umum di 8 Kabupaten di Bali, pengadaan meubelair dan peralatan perpustakaan wilayah dan perintisan sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan landasan bagi Pengembangan Kebudayaan yang lebih mantap dan terarah yang akan dilakukan dalam tahun-tahun mendatang.

Untuk menunjang lebih berhasilnya usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan pada tahun-tahun yang akan datang di Bali perlu lebih diperhatikan penyelesaian beberapa pokok permasalahan.

Pembinaan Permuseuman sebagai pusat studi ilmiah, penikmatan seni rekreasi belum dapat direalisasikan sesuai yang diinginkan. Dalam hubungan ini beberapa museum perlu dikembangkan dan membutuhkan pembinaan lebih lanjut. Konservasi dan penambahan koleksi museum telah dilakukan disamping peningkatan kemampuan tenaga teknis administrasi maupun tenaga teknis operasional. Sistem perlu lebih ditingkatkan disamping pemantapan kelembagaan secara struktural fungsional. Benda-benda purbakala dan sejarah yang terbesar di seluruh Propinsi Bali dan daerah lain yang banyak yang belum diteliti melalui survey dan penggalian arkeologi.

Disamping itu masih perlu dipugar berbagai peninggalan kekayaan budaya bangsa. Khazanah budaya bangsa dalam berbagai bentuknya seperti tradisi adat-istiadat, ungkapan, sejarah rakyat, geografi budaya, arsitektur tradisional belum semuanya dapat diinventarisasikan dan diteliti.

Penerbitan kembali dan penterjemahan naskah-naskah Daerah dan naskah-naskah kuno yang mengandung nilai budaya dan kesejarahan perlu dikembangkan secara mantap. Dalam hubungan ini perlu dirintis Pusat Pengembangan Dokumentasi dan Pelayanan informasi budaya.

Pembinaan kesenian yang mencakup seni rupa, seni patung, seni ukir, arsitektur, seni musik, seni teater, seni sastra dan perdalangan perlu dilanjutkan dan diperluas pengembangannya disamping peningkatan mutu seni secara terus menerus.

Kemampuan pengorganisasian dan pengelolaan pusat-pusat kebudayaan di Bali perlu lebih dimantapkan agar dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pelayanan budaya.

4. Kesehatan dan KB

Masalah kesehatan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diwarnai oleh masih adanya beberapa jenis penyakit, seperti kekurangan gizi, penyakit yang berkaitan dengan masalah sanitasi lingkungan dan penyediaan air minum sehat dan penyakit-penyakit yang tidak menular lainnya.

Meningkatnya pertambahan penduduk sangat mempengaruhi keadaan kesehatan lingkungan, namun demikian indikator umum dapat digambarkan bahwa keadaan kesehatan tidaklah mengecewakan.

Hasil penelitian bersama Program Terpadu KB Gizi Propinsi Bali tahun 1981 ditemukan hasil, bahwa 21,7% Balita kurang gizi dan 1,4% gizinya buruk. Bagi anak sekolah yang tergolong gizi kurang, 13% dan gizi buruk 1,1%. Angka nasional untuk keadaan gizi yang didapat untuk Balita yang kurang gizi 22-44% dan gizi buruk 1,6 - 4,8%.

Suatu survey dalam tahun 1980, menemukan hasil sebagai berikut, ada 63,6% ibu hamil yang mengalami anemia gizi dan 41,5% ibu menyusui.

Angka nasional untuk anemia gizi pada ibu hamil ditemukan 30-70% (1978) sedang pada wanita pada umumnya 40%. Keluhan caries pada gigi, ada 6.527 orang (8,5%) dan keluhan periodental 27.024 orang (35,5%). Begitu pun tentang prosentase penyakit jiwa di propinsi Bali, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, tahun 1980 ada sekitar 2.000 orang penderita baru yang berobat, dan tahun 1981 jumlah tersebut menjadi 2.742 orang. Selain itu menurut hasil survey tahun 1980 di 22 Kecamatan, di Bali juga masih banyak yang menderita penyakit gondok.

Dari 210 desa yang diperiksa, ternyata terdapat 63,3% yang mengalami endemik berat, 9% tergolong endemik sedang, dan 13,8% endemik ringan.

Development works in Bali involved supply of Indonesian and foreign books for public libraries in 8 districts of Bali, and provision of furnitures and other equipments for regional and school libraries. The above-mentioned activities constitute a stronger foundation for further development.

To achieve better promotion and development of culture in the future, a number of problems deserve careful attention.

Musea as scientific study centres and enjoyment fo recreation art have not produced the desired results. In this connection a number of musea should be further developed and supervised. Conservation and increase of museum collections have been carried out beside the promotion of skills among technical administrative as well as technical operational personnel. The system is in need of improvement in addition to structural and functional streamlining of organizations. Besides, a great number of archeological and historical relics in Bali have not been surveyed.

A number of cultural relics are in need of restoration. And some of the national culture in forms of customs, folklores, history, cultural geography and traditional architecture are yet to be studied.

Efforts should also be continued to publish and translate regional and old manuscripts which are rich in cultural as well as historical values. In this context a need arises for the establishment of a centre for the development, Documentation and Services of Cultural Information.

The promotion of arts covering fine arts, sculptures, carvings, architecture, music, theatre, literature and shadow play should be expanded in scope and improved in quality.

The organization capability and management of cultural centres in Bali should be stepped up in order that they may function well as centres for cultural development and services.

4. Health and Family Planning

A study undertaken in 1981 within the Integrated Family Planning and Nutrition programme concluded that in Bali 21.7% of children under five suffered malnutrition and 1.4% in poor Nutrition condition. Among school children, 13.0% suffered malnutrition and 1.1% in poor nutrition. The national figures were respectively 22-44% and 1.6-4.8%.

A survey in 1980 concluded that nutritional anemia was suffered by 63.6% of pregnant mothers and 41.5% of nursing mothers. The national figures for nutritional anemia were 30-70% (1978) among pregnant mothers and 40% among women in general.

Caries inflicted 6,257 persons (8.5%) and periodental diseases 27,024 persons (35.5%). The number of patients of mental disorders rose from 2,000 persons in 1980 to 2,742 persons in 1981. A survey in 1980 involving 22 sub-districts in Bali produced a significant number of persons inflicted with gioter. Out of 210 villages surveyed, 63.3% were inflicted with heavy endemic, 9% with medium endemic and 13.8% with light endemic.

a. Health Facilities

The number of Public Health Centres (non-Inpres) established during Pelita I was 14 units. Up to the end of Pelita III it rose to 81 units, making at least 1 Public Health Centre in each of the 51 sub-districts of Bali. However, in comparison with the number of population, with a ratio of 1 Public Health Centre to serve 30,000 people, there is a need to build 12 more Public Health Centres until the end of Pelita IV.

During Pelita I 409 general clinics and maternity clinics (28 of them private-owned) were built. During Pelita III the number of auxiliary Public Health Centres built was 294 units (26 of them private-owned). See Table IV-6.

The target of new and repetition visits to auxiliary Public Health Centres annually was 2,716,696. Realization in 1981/1982 was 4,095,553 visits (40.35%).

The Regional Office of the Ministry of Health in Bali Province supervises 142 Family Planning clinics, including 7 of private-owned. Realization of target reached 46,505 new acceptors (135.39%). Promotion of active acceptors involved 231,952 persons (102,93%).

According to data gathered by field instructors from the Central Government, visits to Public Health Centre in 1981/1982 averaged 63 persons/day. Bali topped the list for the whole of Indonesia. The national target was 65 persons/day. See Table IV-7.

In addition to the medical personnel as registered in the Table, there were 57 specialists : 10 pediatricians, 10 surgeons, 9 gyneacologists, 8 internists and other specialists.

Seen from accommodation capacity, public hospitals in Bali supplied 8.5 beds for every 10,000 population (the national figure : 7 beds for every 10,000 population). The 8 district public hospitals combined offered 874 beds, 1 provincial public hospital with 695 beds, 2 mental hospitals with 195 beds and 1 leprosy hospital with 8 beds.

During Pelita II the 5 private hospitals combined offered 209 beds. Besides, there were 6 clinical laboratories, 5 public diagnostic RO, 35 dispensaries,

a. Sarana Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang dibangun selama Pelita I di Bali hanya 14 buah (non Inpres). Sampai akhir Pelita III jumlah tersebut sudah mencapai 81 buah. Berarti dari 51 kecamatan yang ada, rata-rata sudah memiliki sebuah Puskesmas bahkan ada yang memiliki dua Puskesmas. Tetapi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan standar 30.000 penduduk untuk sebuah Puskesmas, maka sampai akhir Pelita IV diperlukan 12 buah Puskesmas lagi di sini.

Selain itu perkembangan jumlah Puskesmas pembantu juga berkembang baik. Bila dalam Pelita I jumlah yang dibangun 409 buah BP Umum dan BKIA (28 milik swasta), kemudian dalam Pelita III menjadi 294 buah Puskesmas Pembantu bahkan 26 buah diantaranya milik swasta. Lihat Tabel IV-6.

Tabel / *Table IV — 6*

PENCAPAIAN TARGET K I A DI BALI TAHUN 1981/1982
REALIZATION OF MATERNITY CLINICS TARGET IN BALI, 1981/1982

Legend Uraian	*Population* Populasi	*Target* Target	Pencapaian / *Realization*		
			Number Jumlah	%	Nasional % (1980) *National*
Ibu hamil *Pregnant mothers*	88.910	44.455	36.200	41	35,0
Persalinan *Delivery*	74.091	35.810	33.888	47	27,1
Ibu Nifas/ menyusui *Nursing mothers*	71.621	37.045	17.002	31	31,6
Bayi / *Baby*	71.621	35.810	42.687 *)	59,6	42,0
Anak balita *Children under 5*	296.367	88.910	52.207 *)	17,6	10,8

Keterangan / *Remarks* :

*) Data tahun 1980/1981 hanya meliputi jumlah pencapaian dalam gedung Puskesmas/PP saja.
1980/1981 data only covered realization in public health centres/auxiliary public health services.

Target kunjungan Puskesmas Pembantu baru dan lama di dalam 1 tahun = 2.716.696. Pencapaian kunjungan baru dan lama tahun 1981/1982 sebanyak 4.095.553 orang (40,35%).

Sebagai unit pelaksana KB Departemen Kesehatan propinsi Bali mengelola 142 KKB, termasuk 7 diantaranya adalah PKBRS. Pencapaian target sebanyak 46,505 akseptor baru (135,39%). Pencapaian pembinaan akseptor aktif 231.952 (102,93%).

Dari umpan balik PPL Pusat, kunjungan Puskesmas di Bali tahun 1981/1982, rata-rata per hari ke Puskesmas adalah 63 orang/hari. Bali menempati urutan I di seluruh Indonesia. Secara nasional, kunjungan rata-rata per hari setiap Puskesmas ditargetkan 65 orang/hari. Sedangkan pencapaian target KIA di Bali (tahun 1981/1982), dapat dilihat pada Tabel IV-7.

Di samping tenaga medis yang tercantum pada Tabel tersebut, masih terdapat juga 57 tenaga ahli, dengan perincian sebagai berikut : 10 orang untuk kesehatan anak, ahli bedah 10 orang, kebidanan 9 orang, ahli penyakit dalam 8 orang dan selebihnya dokter ahli lain.

Keadaan Rumah Sakit Umum milik pemerintah, dilihat dari segi tempat tidur, tiap 10.000 penduduk ada 8,5 tempat tidur. (Angka nasional; 7 tempat tidur tiap 10.000 penduduk). Dari 8 rumah sakit umum kabupaten ada 874 tempat tidur, 1 rumah sakit umum Pusat memiliki 695 tempat tidur, dua RS Jiwa, 195 tempat tidur, dan 1 RS Kusta dengan 8 tempat tidur.

Rumah sakit milik swasta dalam Pelita II ada 5 buah dengan jumlah 209 tempat tidur. Kemudian ada 6 laboratorium klinik, 5 buah diagnostik RO umum, 35 buah apotik, 14 PBF, 219 praktek swasta dokter umum, 32 praktek dokter ahli, 21 praktek gigi. Lihat Tabel IV-8.

Sarana Pendidikan Tenaga Kesehatan Reguler. Bali memiliki sebuah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang setiap tahun, rata-rata dapat meluluskan sekitar 30 orang dokter. Kecuali itu pendidikan tenaga para medis yang ada adalah; SPK-Siswa baru tiap tahun rata-rata 50 orang; SPPH-Siswa baru tiap tahun rata-rata 40 orang; SPRP-Siswa baru tiap tahun rata-rata 40 orang.

Sarana Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Propinsi Bali adalah UPT dari Ditjen POM Departemen Kesehatan Republik Indonesia, berdiri tahun 1979, termasuk BPOM kelas B.

b. Penyediaan Air Bersih

Cakupan penduduk yang dapat dilayani dengan air bersih menurut kapasitas masing-masing jenis sarana dalam periode 1974/1975 - 1982/

14 pharmaceutical wholesalers, 219 private-practice doctors, 32 private-practice specialists and 21 private-practice dentists. Table IV-8.

Bali has the benefit of a School of Medicine of the University of Udayana which annually produces about 30 graduates. Besides, there are training institutes for paramedics : SPK (Assistant Nurse School) with 50 new students annually; SPPH with 40 new students; and SPRP with 40 new students.

In Bali there is also a Centre for Food and Drug Inspection, a technical execution unit of the Directorate General of Food and Drug Control, the Ministry of Health, Republic of Indonesia, founded in 1979.

b. Clean Water Supply

During 1974/1975 - 1982/1983, clean water supply could only serve 52% of the whole population of Bali. The increase of clean water production capacity until the end of Pelita III reached 1,371.28 litres/second, spread in the 8 districts. Meanwhile, clean water distribution amounted to 43,743 household connections and 271 public taps, serving 365,142 people.

Tabel / *Table IV — 7*

JUMLAH PUSKESMAS, TENAGA MEDIS PADA PUSKESMAS
PER KABUPATEN TAHUN 1984.
NUMBER OF PUBLIC HEALTH CENTRES, MEDICAL PERSONNEL, BY DISTRICT, 1984

No. Kabupaten *District*	Jumlah Puskesmas *Number of Puskesmas*	Tenaga Medis / *Medical Personnel*			Jumlah Para Medis dan Non Medis *Paramedics*
		Dokter *Doctor*	Dokter Gigi *Dentist*	Jumlah *Total*	
1. Jembrana	7	7	1	8	126
2. Tabanan	12	12	1	13	238
3. Badung	13	14	3	17	250
4. Gianyar	11	12	1	13	187
5. Klungkung	7	7	2	9	128
6. Bangli	6	7	—	7	86
7. Karangasem	11	12	1	13	154
8. Buleleng	16	17	2	19	234
Jumlah total/ 1984	83	88	11	99	1403

Tabel / *Table IV — 8*

SARANA PELAYANAN MILIK SWASTA DI BALI DALAM PELITA III
HEALTH FACILITIES IN BALI, PELITA III

No.	Keterangan / *Legend*	Jumlah / *Number*
1.	RS Swasta *Private hospitals*	5 buah dengan jumlah tempat tidur 209 *5 units, 209 beds*
2.	Klinik Spesialis *Specialist Clinics*	1 buah dengan jumlah tempat tidur 10 *1 unit, 10 beds*
3.	Laboratorium Klinik *Clinical Laboratory*	6 buah / *units*
4	Diagnostik RO Umum *Public Diagnostic RO*	5 buah / *units*
5.	RO Gigi / *Dentistry RO*	1 buah / *units*
6.	Apotik / *Dispensaries*	35 buah / *units*
7.	PBF / *Pharmaceutical Whole-salers*	14 buah / *units*
8.	Toko obat berizin *Licenced drugstores*	45 buah / *units*
9.	Praktek swasta dokter umum *Private-practice, doctors*	219 buah / *units*
10.	Praktek swasta dokter ahli *Specialist private practice*	32 buah / *units*
11.	Praktek Physioterapi *Physiotheraphy practice*	3 orang / *physioteraphists*
12.	Pratek swasta bersalin *Private midwifery practice*	3 orang / *midwives*
	Rumah Sakit Umum Pemerintah / *Public hospitals*	
1.	8 RSU Kabupaten *8 Units District public hospitals*	874 buah tempat tidur / *beds*
2.	1 RSUP *1 Units Provincial public hospital*	695 buah tempat tidur / *beds*
3.	2 RSPAD *2 Units Army hospitals*	201 buah tempat tidur / *beds*
4.	1 RS Jiwa *1 Unit Mental hospital*	195 buah tempat tidur / *beds*
5.	1 RS Kusta *1 Unit Leprosy hospital*	8 tempat tidur (hanya untuk reaksi lepra berat) / *beds*

1983, mencapai 52% dari jumlah penduduk Bali. Peningkatan kapasitas produksi air bersih sampai akhir Pelita III : 1.371,28 liter/detik, tersebar pada 8 kabuapten. Sedangkan pelayanan air besih mencapai 43.743 sambungan ke rumah dan 271 kran umum, yang mampu melayani sekitar 365.142 orang penduduk.

Penyediaan air bersih adalah tugas pemerintah daerah, namun mengingat besarnya masalah yang dihadapi dan diinvestasi, dana yang diperlukan masih jauh dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah pusat dianggap masih perlu untuk membantu pemerintah daerah dengan mengambil prakarsa pembangunan dalam penyediaan air bersih.

Program Pemerintah Daerah, dalam mengatasi penyediaan air bersih, antara lain :
Penambahan kapasitas produksi air bersih, mencapai sasaran pelayanan sampai 75% penduduk kota, Penambahan/perluasan jaringan distribusi serta pemanfaatan kapasitas produksi air bersih dengan sambungan rumah dan hidran umum, Penanganan produksi dan distribusi air bersih untuk ibukota kecamatan, Kriteria desain dan biaya disesuaikan dengan standar yang ada sedang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan berupa : sumur gali, sumur pompa tangan dangkal/dalam, PAH, perpipaan, PMA, sumur artetis, saringan pasir lambat, sarana lain tepat guna). Pengawasan dan pemeliharaan, baik yang rusak, maupun yang masih baik, perlu diurus baik dengan rehabilitasi maupun dengan penggantian.

Untuk sarana penyediaan air bersih, dalam dua Pelita di daerah Bali telah terpasang sarana dari dana Inpres dan dari dana lainnya. Lihat Tabel IV-9.

c. *Kependudukan dan Keluarga Berencana*

Dari hasil SUPAS tahun 1976 (Survey Penduduk Antar Sensus) dan hasil SUSENAS tahun 1979 (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang diselenggarakan oleh BPS (Biro Pusat Statistik) dapat ditarik gambaran mengenai perkembangan pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap KB, khususnya pada wanita berstatus kawin yang masih dalam usia subur di Bali.

Proporsi yang mengetahui cara KB adalah sebesar 71,3% pada tahun 1979, dari 18.129.987 PUS, sedangkan tahun 1976 PUS adalah 14.837.758 (61%). Berarti dalam jangka waktu 3 tahun, terdapat peningkatan 10%, dalam hal pengetahuan dan sikap mereka. Di Kota menunjukkan angka yang lebih tinggi lagi.

Dalam Pelita I Propinsi Bali dapat mencapai 131.183 peserta KB baru secara komulatif, yaitu 85,74% dari jumlah sasaran yang perlu dicapai sebanyak 153.000.

Dalam Pelita II tercapai 225.409 peserta KB baru atau sama dengan 101,08% dari jumlah sasaran yang ditetapkan sebanyak 223.000.

Dalam Pelita III, misalnya pada tahun 1982 terdapat 168.665 peserta KB baru, atau 99,8% dari jumlah yang ditargetkan dalam empat tahun. Sedangkan bila dilihat dari sasaran sebanyak 218.589 untuk periode 5 tahun, prosentasenya hanya 77,16%.

Dalam Pelita I komposisi pemakaian kontrasepsi sebagian terbesar dari peserta memilih IUD (66,08%), disusul oleh Pil (24,89%), Kondom (8,35%) dan obat vaginal (0,68%).

Dalam Pelita II komposisinya agak berubah yaitu : 53,47% IUD, 22,90% Pil, 19,18% Kondom, 3,02% MOW, 0,55% MOP, 0,46% Suntikan dan 0,42% obat vaginal.

Dalam Pelita III (sampai dengan Desember 1982) komposisinya menjadi : 67,26% IUD, 13,71% Pil, 7,55% kondom, 5,14% MOW, 0,32% obat vaginal dan 0,31% MOP, 5,71% suntikan.

Mantapnya pemakaian kontrasepsi oleh para peserta KB, dapat diketahui antara lain dari tingkat peserta KB aktif. Dari rencana pencapaian akseptor aktif yang disusun dalam Pelita II Program KB di Bali, tercantum bahwa pada akhir Pelita III peserta KB aktif sebanyak 228.000 Lihat Tabel IV-10.

Dalam tahun-tahun pertama pelaksanaan program Keluarga Berencana di Bali juga dilaksanakan melalui pendekatan sistem Banjar. Para pesertanya kebanyakan masih berasal dari tempat-tempat yang dekat dengan Klinik Keluarga Berencana. Kontrasepsi maupun kegiatan follow up-nya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh tenaga-tenaga yang ada di Klinik Keluarga Berencana terdekat.

Disamping masih dekatnya jarak ke klinik, jumlah pesertanya masih belum begitu banyak. Tentu saja hal ini mempengaruhi follow up kegiatan, juga mempengaruhi jenis maupun jumlah kontrasepsi yang perlu disediakan dan mempengaruhi rencana kerja yang patut disusun.

Sebagaimana halnya di tingkat nasional, di Bali pun pengelolaan program KB dikembangkan melalui 3 periode, yaitu periode pelaksanaan melalui rintisan organisasi non pemerintah sampai tahun 1967, selanjutnya periode semi pemerintah (1968-1969) dan sejak tahun 1970 periode pemerintah.

Untuk mencapai tujuan program KB, yaitu terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera di kalangan masyarakat secara

The development of clean water supply is the responsibility of the regional government. In view of the bulk of problems, however, the required fund can not be met by the regional government.

For the development of clean water supply, the government has set up the following programmes : Clean Water production capacity to be increased to serve 75% of urban population, expansion of distribution networks, maximum use of production capacity through household connections and public taps, management of clean water production and distribution in subdistrict towns, composition of criteria for design and expense such as dug wells, shallow/deep manual-pump wells, rain-water reservoirs, piping networks, water-holes reservoirs, artesian wells, sand filter, other efficient facilities, supervision and maintenance, rehabilitation and replacement.

For the development of clean water facilities, Bali has benefitted from Inpres and other fund allocation since Pelita II. See Table IV-9.

Tabel / *Table IV — 9*

No.	Keterangan / *Legend*	Inpres	Unicef, Regional budget (APBD dan ADB)
1.	PP / *Piping network*	105 buah /*units*	145 buah /*units*
2.	Sumur Artetis *Artesian wells*	7 buah /*units*	7 buah /*units*
3.	PAH *Rain-water Reservoir*	476 buah /*units*	607 buah /*units*
4.	PMA *Spring-water Reservoir*	105 buah /*units*	102 *buah* /*units*
5.	SPT Dangkal *Shallow manual-pump wells*	6.441 buah /*units*	7.722 buah /*units*
6.	SPT Dalam *Deep manual-pump wells*	924 buah /*units*	1.310 buah /*units*
7.	Sumur Gali *Dug wells*	300 buah /*units*	300 buah /*units*
8.	Jamban Keluarga *Family lavatory*	93.200 buah /*units*	94.100 buah /*units*

Sumber : Biro Humas Pemda Tingkat I Bali.
Source : Bureau of Public Relations, Regional Administration, Bali Province.

c. *Demography and Family Planning*

The Inter-Census Population Survey 1976 and the National Socio-Economic Survey 1979 gave some illumination on the development of knowledge and social attitude concerning Family Planning, especially among fertile-age married women.

The percentage of fertile-age couples who had the necessary knowledge on Family Planning methods rose from 61% (14,837,758) in 1967 to 71.3% (18,129,987) in 1979. The percentage was higher among urban population.

During Pelita I Bali Province registered a cumulative total of 131,183 new acceptors, or 85.74% of the target (153.000).

In the period of Pelita II the figure was 225,409 new acceptors, or 101.08% of the target (223,000).

For the first four years of Pelita III the total of new acceptors was 168,665 or 99.8% of the four-year target. For the whole 5 years of Pelita III, however, the percentage of realization only reached 77.16% (218,589).

During Pelita I most of acceptors used IUD contraceptives (66.08%), to be followed by Pills (24.89%), condom (8.35%) and vaginal cream (0.68%).

In the period of Pelita II the composition was somewhat changed : IUD 53.47%, Pills 22.90%, condom 19.18%, MOW 3.02%, MOP 0.55%, injection 0.46% and vaginal cream 0.42%.

Up to December 1982 of Pelita III the composition was as follows : IUD 67.26, Pills 13.71%, condom 7.55%, MOW 5.14%, MOP 0.31%, injection 5.71% and vaginal cream 0.32%.

The effective use of contraceptives by Family Planning acceptors can only be measured by participation rate of active acceptors. The target for the end of Pelita III was 228,000 active acceptors. See Table IV-10.

During the first years of implementation of the Family Planning Programme in Bali, the Banjar system of approach was also used (Banjar = sub-unit of administrative village). The acceptors usually lived nearby a Family Planning clinic. The contrdceptives use and the follow-ups could be adequately supervised by the clinic personnel.

Besides the close vicinity with the clinic, the number of acceptors were also still low. This influenced the follow-up activities, the preference of contraceptives, the number of contraceptives and the work plan.

Just like in the national level, in Bali the management of Family Planning programme has been developed through 3 periods, i.e. implementation through pioneering works of non-government organization (up to 1967), the semi-government period (1968-1969) and the government period since 1970.

This efforts to achieve the ideal of Family Planning programme, i.e. a happy and prosperous small-size family, have been faced with a number of operational impediments, involving demographic, geographic and manage-

luas dan merata, dijumpai beberapa masalah yang merupakan hambatan bagi pelaksanaan program operasional di lapangan. Masalah tersebut meliputi berbagai aspek demografi, geografi serta berbagai aspek pengelolaan program.

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan program adalah :

1. Belum tersedianya data basis kependudukan yang siap pakai untuk kepentingan perencanaan dan penilaian program di daerah.
2. Kesepakatan politis di tingkat pusat antara BKKBN dengan unit-unit pelaksana kurang tersalur secara lancar ke tingkat propinsi dan kabupaten.
3. Masih terbatasnya dana yang dapat disediakan untuk pelaksanaan program di lapangan.
4. Penambahan tenaga selalu tidak sesuai dengan perkembangan program yang sangat erat.
5. Lajunya program belum didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan.

5. Kesejahteraan Sosial

Tata cara kehidupan masyarakat Bali, secara umum dapat dikatakan membantu dan sangat mendukung usaha penanggulangan masalah sosial. Sistem kesatuan hidup masyarakat Bali secara umum bersumber dari Agama Hindu serta menganut azas kebersamaan dan gotong royong yang sangat tebal di pedesaan. Mereka juga selalu terikat dalam kesatuan hidup yang bersifat tradisional. Ikatan tersebut meliputi ikatan "Kahyangan Tiga" dalam agama, serta ikatan keluarga (Dadia), Pemaksan, Kesatuan Banjar, desa adat dan awig-awig dalam bidang organisasi adat. Karena itu pada dasarnya tidak ada penduduk atau kelompok yang tinggal terpencil jauh dari kelompoknya, termasuk mereka yang cacat tubuh maupun para fakir miskin.

Berdasarkan statusnya, organisasi sosial di pedesaan saat ini dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi berbadan hukum dan organisasi yang tidak berbadan hukum. Organisasi yang tidak berbadan hukum meliputi : Sinoman, yaitu suatu perkumpulan kematian, arisan dan kerukunan sosial lainnya. Pada tahun 1984 Lembaga Sosial ini berjumlah 98 buah. Organisasi atau kerukunan sosial yang berbadan hukum, pada umumnya bergerak pada bidang pendidikan, sampai tahun 1984 terdapat sebanyak 88 buah.

Disamping panti-panti asuhan yang terdapat di Bali, telah didirikan pula Sekolah Luar Biasa guna memberikan pendidikan bagi penderita ketunaan. Sekolah-sekolah tersebut adalah Sekolah Luar Biasa Bagian A untuk para tuna netra, Bagian B untuk penderita tuli-bisu, Bagian C untuk anak-anak kurang normal dan Bagian D untuk anak-anak yang menderita kelumpuhan.

Masalah sosial lainnya yang menonjol adalah masalah jompo. Data yang disusun oleh Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Bali menunjukkan bahwa jumlah para lanjut usia (jompo) di Bali pada tahun 1983 berjumlah 206.858 orang.

Pada tahun 1984, di Bali terdapat 2 buah Sasana Tresna Werdha (penampungan orang tua jompo). Kedua sasana ini dibina oleh Departemen Sosial. Kedua sasana ini adalah Sasana Tresna Werdha "Wana Seraya" yang berada di Kabupaten Badung dengan kapasitas pelayanan 100 orang dan Sasana Tresna Werdha "Jara Mara Pati" yang berada di Kabupaten Buleleng dengan kapasitas 50 orang.

Di seluruh Bali terdapat juga 20 buah organisasi pelayanan kesejahteraan sosial yang terdiri dari 3 buah milik Pemerintah dan 17 milik swasta. Semuanya berbentuk sasana dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Bali. Di Kabupaten Badung terdapat 10 buah, Kabupaten Tabanan 2 buah, Kabupaten Jembrana 4 buah, Kabupaten Buleleng 2 buah, Kabupaten Bangli 1 buah dan di Kabupaten Klungkung 1 buah.

Semakin baik tingkat pemenuhan keperluan dasar manusia termasuk derajat kesehatan penduduk maka angka harapan hidup akan meningkat, yang pada akhirnya akan tercermin pada semakin meningkatnya lanjut usia/jompo, oleh karenanya diperlukan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.

Di lain pihak disadari bahwa sarana yang diperlukan untuk menerapkan kesejahteraan sosial adalah tenaga maupun dana relatif masih sangat terbatas sehingga dengan menyadari besarnya permasalahan yang harus ditangani kiranya dalam masa mendatang perlu ditingkatkan lagi kearah keikutsertaan masyarakat.

Pada hakekatnya pembangunan adalah pertumbuhan dan perubahan, sehingga oleh karenanya upaya menyiapkan kondisi sosial untuk menerima perubahan merupakan bagian yang sangat penting dalam melaksanakan pembanguann itu sendiri. Di Bali pada tahun 1984 jumlah penyandang cacat cukup tinggi yakni 11.777 jiwa, diantaranya 4.480 jiwa ialah anak-anak. Lihat Tabel IV-11.

Dari jumlah penderita cacat seperti tertulis dalam tabel tadi maka hanya sebagian saja yang terdaftar dan direhabilitasi melalui program

ment aspects.

The problems faced in the management of programmes include :

1. *Unavailability of ready-for-use basic data of demography for planning and assessment purposes.*
2. *Political agreement in national level between the National Family Planning Coordinating Board and the executive units has not been well-exercised in regional and district levels.*
3. *Limited fund for field works in the implementation of programmes.*
4. *Incompatability between personnel increase and programme development.*
5. *Implementation of programmes has not been supported with adequate facilities and infrastructures.*

5. Social Welfare

The Balinese customs in general enhance the efforts to overcome social welfare problems. In principle the living system of the Balinese springs from Hinduism, subscribing to the principles of unity and mutual assistance. They are always committed in a traditional living unity. It covers the religious commitment of "Kahyangan Tiga" and familial relationship (dadia), Pemaksan, Banjar unity, customary village and awig-awig in customary organizations. In essence, no one or group can live in isolation from the bigger union, including the physically deformed and the poor.

Tabel / *Table IV — 10*

HASIL KEGIATAN YANG DICAPAI KELUARGA BERENCANA
DI DAERAH BALI
ACHIEVEMENT OF FAMILY PLANNING PROGRAMME IN BALI

No.	Tahun *Year*	Target Akseptor *Acceptors*	Pencapaian Terhadap Satu Tahun *Annual Achievement*	(%) Pencapaian Terhadap Satu Tahun *Percentage of Achievement*
1.	1978/79	41.000	44.818	109,31%
2.	1979/80	39.000	42.248	108,33%
3.	1980/81	51.000	42.676	83,68%
4.	1981/82	34.349	46.025	133,99%
5.	1982/83	44.578	28.714	64,41%
6.	1983/84	49.662	51.569	103,84%
7.	1984/85	57.508	45.747	79,55%

Sumber : BKKBN Propinsi Bali
Source : Regional Office of the National Family Planning Coordinating Board, Bali Province.

By status, the social organizations in rural areas are classified into two groups, i.e. corporate-body organization and non-corporate body organization. The non-corporate body organizations include Sinoman (community association in case of death), arisan (neighbourhood club) and other social harmony associations. In 1984 these social associations numberred 98. Social associations in form of corporate bodies are generally active in education. In 1984 they numbered 88 units.

In addition to orphanages, schools have also been established for the handicapped; for the blind, the deaf-and-mute the abnormal, the paralyzed.

Another distinct social problem is one related with the elderly people. According to data from the Regional Office of the Ministry of Social Affairs in Bali Province, there were 206,858 elderly people in 1983.

In 1984 there were 2 Sasana Tresna Werdha (homes for the elderly). They are the "Wana Seraya" in Badung District with a capacity to accommodate 100 elderly people and the "Jara Mara Pati" in Buleleng District with a capacity of 50 persons. Both are under direct supervision of the Ministry of Social Affairs.

In Bali there are 20 organizations for social welfare services, 3 government-owned and 17 private-owned; 10 in Badung District, 2 in Tabanan District, 4 in Jembrana District and 1 each in Districts of Bangli and Klungkung.

The promotion of basic need fulfilment, including health, will increase life expectancy as reflected in the rising number of elderly people, thus dictating coverage expansion of social welfare services.

On the other hand it is realized in full that the available workers and fund for social works are quite limited and the problem are staggering. Thus, community participation should continuously be escalated.

In 1984 there were 11,777 deformed persons, 4,480 of them were children. See Table IV-11.

Out of the above-mentioned total, only part of them are registered and rehabilitated through social welfare programmes. The rest are obliged to overcome their own problems on their own capability with assistance from their relatives.

Community participation in social works should be promoted through

Tabel / *Table IV — 11*

JUMLAH PENDERITA CACAT PADA TAHUN 1984
NUMBER OF DEFORMED PERSONS, 1984

No.	Jenis Cacat *Type of deformity*	Anak *Children*		Dewasa *Adults*		Jumlah *Sub-total*		Jumlah menurut jenis *Total*
		L	P	L	P	L	P	
1.	Cacat tubuh *Bodily deformed*	821	558	1.528	989	2.349	1.547	3.896
2.	Cacat kaki *Leg deformed*	476	318	550	366	1.026	684	1.710
3.	Cacat tangan *Hand deformed*	143	105	201	142	344	247	591
4.	Tuna netra *The blind*	271	212	655	695	926	907	1.833
5.	Tuna rungu/ wicara *The deaf and the mute*	559	471	897	788	1.456	1.259	2.715
6.	Cacat mental *Mentally retarded*	269	277	268	200	555	477	1.032
		2539	1941	4.117	3.180	6.646	5.121	11.777

Keterangan : Anak; Umur dibawah 21 tahun/belum kawin.
Age under 21 and not yet married
Sumber : Buku Data Kesejahteraan Sosial Tahun 1983/84 BAPPEDA DATI I BALI.
Source : Book on Data of Social Welfare, 1983/84, BAPPEDA DATI I BALI.
*= Laki-laki = **Male**; P = Perempuan = **Female***

sosial, sedangkan sebagian lagi mengatasi tantangan hidupnya dengan bantuan keluarga dan kemampuan sendiri.

Peranserta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial dikembangkan melalui bimbingan Pemerintah, sesuai dan sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan bidang kesejahteran sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan secara terpadu dan dalam kerjasama lintas sektoral dengan semua bidang yang berkaitan dengan upaya penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial

Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial antara lain juga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan swadaya sosial golongan penduduk miskin di daerah pedesaan maupun perkotaan agar mereka dapat memperbaiki tingkat kehidupannya dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya dengan mengikutsertakan Organisasi Masyarakat, Pekerja-pekerja sosial, Kaum wanita dan Generasi Muda serta potensi sosial lainnya.

Sedangkan program bantuan sosial dimaksud untuk memberikan pelayanan dan bantuan sosial, memelihara serta meningkatkan kesejahteraan sosial golongan masyarakat, keluarga atau kelompok sosial tertentu yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

6. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Keadaan tanah di Bali yang memerlukan penghijauan, pada tahun 1976 tercatat seluas 210.057 Ha. Dari sebanyak itu untuk perlindungan tata air seluas 47.875 Ha, bertopografi curam 121.137 Ha, perluasan tanaman keras 23.615 Ha dan tidak produktif 17.430 Ha.

Kondisi tanah tersebut umumnya bila tidak segera mendapat perlakuan sebagaimana mestinya (pembuatan tanaman, hutan rakyat, terasering penyempurnaan teras, saluran pembuangan air dan pengendali serta usaha-usaha lainnya), akan menyebabkan keadaan makin kritis terutama disebabkan oleh erosi.

Realisasi pelaksanaan penghijauan di Bali pada Pelita II misalnya tahun 1976/1977 - 1981/1982 seluas 97.129 Ha yang berhasil dihijaukan 29.843 Ha (30,73%). Kegiatan tahun 1982/1983 seluas 9.201 Ha.

Sasaran reboisasi sejak Pelita II seluas 15.000 Ha meliputi areal kawasan hutan yang keadaannya kritis, gundul bekas kebakaran dan tebangan. Realisasi pelaksanaan reboisasi dari tahun 1976/1977 - 1981/1982 sebanyak 11.654 Ha, berhasil seluas 7.092 Ha (66 - 90%). Pelaksanaan kegiatan tahun 1982/1983 seluas 748 Ha sedang dilaksanakan.

Luas hutan di Bali ± 125.000 Ha (sekitar 22,19% luas daratan) dengan hutan suaka alam seluas 21.000 Ha yang meliputi Taman Nasional Bali Barat, Batu Karu, Cagar Alam Sangeh, hutan wisata Penelokan. (Tabel IV - 13).

Melihat angka tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan penghijauan masih rendah sedangkan keberhasilan reboisasi cukup memenuhi sarat minimal.

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap usaha

government supervision in line with development policies in social welfare sector.

Social welfare promotion is an integrated programme directed to step up and develop auto-activity of poor population to improve their standard of living. Social organizations, social workers, women, the younger generation and other social potentials are invited to be involved.

Meanwhile, social aid programme is directed to provide social aid and services in maintaining and improving the social welfare of community groups, families or other social groups which can not fulfill their social functions adequately.

6. Natural Resources and Living Environment

In 1976 the land area of Bali in need of regreening was registered at 210,057 Ha, comprising of 47,875 Ha for water structure protection, 121,137 Ha of steep topography, 23,615 Ha for perennial plants expansion and 17,430 Ha of unproductive area.

Failing speedy adequate management (such as reforestation, terrace-making, establishment of spillway and water control), the land area will become more critical, particularly due to erosion.

The target of regreening in Bali during 1976/1977 - 1981/1982 reached 97,129 Ha, realization 29,843 (30.73%). Realization in 1982/1983 was 9,201 Ha.

The target of reforestation during Pelita II was 15,000 Ha, realization during 1976/1977 - 1981/1982 was 11,654 Ha, classified as successful (66-90%) 7,092 Ha. Realization in 1982/1983 was 748 Ha.

Forest area in Bali amounts to 125,000 Ha (about 22.19% of total land area), including natural reserves of 21,000 Ha in the National Park of West Bali, Batu Karu, Sangeh, tourism forest of Penelokan.

It must be admitted that the success of regreening programme is still low while reforestation has met the minimum reguirement.

The unfavourable result was mainly due to lack of awareness of regreening efforts among the public, cultivation of fallow land, maintenance of regreening plants, and cultivation of arid land related with land conservation.

Land conservation, including reserved areas, may undergo undesirable impact of settlement expansion, cattle breeding, arid land cultivation, plantation estates and the likes.

It is estimated that during Repelita IV the critical land to be rehabilitated will reach 80,000 Ha (16,000 Ha annually). And in view of existing capability, reforestation by Forestry Office during Pelita IV will reach 5,000 Ha (1,000 Ha annually).

Living Environment

The development of living environment in urban areas will attract rural population to move to the cities, thus threatening living environment in urban areas due to heavy pressure for employment opportunities, public facilities, housing, and so on.

penghijauan, penanaman tanah yang kosong, pemeliharaan tanaman penghijauan, pemanfaatan lahan-lahan kering dikaitkan konservasi tanah.

Kawasan konservasi baik yang sudah dikukuhkan maupun berupa areal cadangan, dan kemungkinan perkembangan selanjutnya mengalami gangguan oleh adanya kegiatan yang kurang serasi berupa pemukiman, pengembalaan, perladangan, perkebunan lain sebagainya.

Diperkirakan pada Repelita IV lahan kritis yang perlu direhabilitir ± 80.000 Ha (tiap tahun 16.000 Ha). Dalam Repelita IV sesuai dengan kemampuan Dinas Kehutanan direncanakan reboisasi seluas 5.000 Ha (tiap tahun 1.000 Ha).

Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan pemukiman daerah perkotaan akan menarik penduduk daerah pedesaan yang miskin untuk pindah ke kota hingga kemudian lingkungan hidup di kota akan menjadi buruk karena tekanan berat terhadap penyediaan lapangan kerja, fasilitas umum, perumahan dan lain-lain.

Di Bali masalah lingkungan hidup ditekankan pada sektor air, sampah, lalu lintas, tempat-tempat rekreasi, pencemaran (polusi) dan meteorologi dan geofisika.

Masalah air ini meliputi pengolahan dalam arti luas jaringan air minum dengan pipa umumnya masih terbatas kemampuannya, sehingga masih banyak warga kota menggunakan air sumur, baik dengan sumur gali, maupun dengan sumur pompa, maka perlu dikembangkan pemanfaatan air, tanah untuk mencukupi air bersih.

Sebenarnya penyediaan air bersih adalah tugas pemerintah daerah, namun mengingat besarnya masalah yang dihadapi dan investasi dana yang diperlukan masih jauh dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah pusat dianggap masih perlu membantu prakarsa pembangunan dalam penyediaan air bersih.

Sedangkan dalam menanggulangi masalah sampah, meliputi tentang cara-cara pengumpulan, cara pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan sampah, atau pemusnahan sampah adalah perlunya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang lainnya adalah tentang mendapatkan tempat untuk mengumpulkan sampah (dumping site) agar tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya dan tidak mengganggu lingkungan serta perlu dipikirkan untuk memproses sampah guna dimanfaatkan sebagai pupuk (kompos) bagi pertanian.

Pencemaran udara (polusi) di Bali umumnya belum begitu parah. Namun dengan meningkatnya jenis dan jumlah kendaraan serta tidak cukupnya tempat parkir di wilayah perdagangan dan pertokoan, menyebabkan jalan jadi sempit, hal itu akan menyebabkan polusi kebisingan yang tinggi. Tetapi yang sangat mengkhawatirkan adalah sistem pembuangan air bekas pada hotel-hotel di pantai Sanur dan Kuta dapat mencemarkan pantai, sedangkan pantai merupakan atraksi utama bagi wisatawan.

Balai Meteorologi dan Geofisika Wilayah III mengelola beberapa stasiun yang ada di Bali, diantaranya :

a. Kantor Balai Wilayah III sebagai pusat koordinasi dan pengawasan;
b. Stasiun Meteorologi Ngurah Rai sebagai pusat pelayanan jasa meteorologi terutama untuk kebutuhan penerbangan.
c. Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar dan
d. Stasiun Geofisika Abang Karangasem, sebagai pengamatan gempa bumi dan unsur geofisika lainnya.

Disamping keempat stasiun tersebut, di Bali terpasang stasiun-stasiun kerjasama yang berupa :

a) 62 Stasiun hujan Obs
b) 12 Stasiun hujan Otomatis
c) 4 Stasiun penguapan
d) 2 Stasiun Meteorologi pertanian khusus.

Mengembangkan dan menciptakan taman-taman sebagai tempat rekreasi dalam rangka pelaksanaan gagasan "Bali Menuju Pulau Taman", antara lain memiliki aspek landskap, aspekk arsitektur tradisional, aspek seni budaya, aspek tata ruang dan aspek kemasyarakatan perlu diprogramkan melalui suatu penelitian dan lokakarya.

Dalam rangka penanganan usaha-usaha pertamanan dalam kaitannya dengan keindahan dan kelestarian perlu dibentuk Dinas/Instansi yang menangani kegiatan pertamanan. Juga guna pengembangan kota yang tertib dan teratur perlu dilaksanakan mengembangkan industri yang tidak menimbulkan polusi, misalnya industri penunjang pariwisata.

Dalam menanggulangi segala masalah-masalah yang ada untuk kepentingan sumber daya alam dan lingkungan hidup Bali dalam Repelita IV mempunyai program sebagai berikut :

1. Penyelamatan hutan, tanah dan air,

In Bali the management of living environment problems is focused on water supply, wastes, traffic, recreation centers, pollution, and meteorology and geophysics.

The problems of water supply include processing in a wide sense. Distribution networks with piping system is still limited in capacity, forcing city dwellers resort to ground water through dug wells as well as pump wells.

Admittedly, the development of clean water supply is the responsibility of the government. However, if view of the bulk of problems to be faced and the regional government capacity falls short of the required investment, the Central government is expected to provide support.

The management of waste problems includes the systems of collecting, transportation, disposal, recycling of wastes, and fostering of community's consciousness not to throw away wastes outside waste box. Another problem is the dumping site. It should also be considered to recycle wastes, for example to become compost fertilizer.

Air pollution in Bali has not reached the serious stage. But the increase of types and number of vehicles coupled with the lack of parking space have made the street very crowded and thus resulting in noise pollution. But the most alarming is the disposal system of water wastes from hotels in Sanur and Kuta Beaches. Uncontrolled, the water wastess may mar the tourists' paradise.

Region III Office of Meteorology and Geophysics in Bali manages a number of stations. Among others :

a. Region III Office as centre of coordination and supervision.
b. Ngurah Rai Meteorology station as centre of meteorological services, particularly as regard aviation.
c. Geophysics station in Sanglah, Denpasar. And
d. Geophysics station in Abang, Karangasem, as observation centre of earthquakes and other geophysic elements.

In addition to the four stations mentioned above, there are also joint stations in Bali. They are :

a) 62 rain-observation stations
b) 12 automatic rain-observation stations
c) 4 steam-observation stations
d) 2 special meteorology stations for agriculture.

The development of parks as recreation centres within the implementation of the idea "Bali as Island of Parks" has the aspects of landscape, traditional architecture, arts and cultures, land use and community life. All of them should be programmes through scientific management.

Within the efforts of parks development to promote natural beauty and preservation, a need arises for the establishment of an office in charge of parks development and maintenance. Besides, orderly development or urban areas should be pursued through the promotion of non-pollution industry, such as those in support of tourism.

To overcome the problems of natural resources and living environment, the Province of Bali has set up the following programmes in Repelita IV :

1. Conservation of forests, land and water.
2. Environmental conservation (natural reserves, the National Park in West Bali).
3. Promotion of natural resources and living environment.
4. Control of environmental pollution and damage.
5. Better management of recreation centres.
6. Establishment of climatology and meteorology stations.
7. Establishment of rain-observation stations.
8. The installation of air pollution gauge.
9. The installation of electric earth magnet equipment,
10. The installation of weather radio.

7. Public Housing and Residence

Good housing condition can support economic development efforts, while in turn proper housing procuring efforts depend on economic capacity. It is expected that improvement efforts regarding housing and environment quality both in urban as well as rural areas can reach a certain level where most people in the Balinese society dwell in healthy homes and environment.

The present urban housing condition in Bali indicates a fairly good economic situation of the people. After the launch of a nation-wide housing programme by the government during The Second Five-Year development Plan, a great deal of progress has been achieved in Bali in the last few years, such as increasing number of newly built houses especially through KPR-BTN (Public Housing Loans - National Savings Bank), Papan Sejahtera (Private Public Housing Developer), and Perum Perumnas (National Public Housing Developer).

Nevertheless, due to population increase, housing in Bali are still inadequate in number. Moreover, there are still houses with poor conditions in terms of comfort, health and environment.

In this respect the Government exerts every effort during The Third Fife-Year Development Plan to establish Public Residence Quarters and Housings in urban areas.

2. **Konservasi di kawasan (cagar alam, suaka margasatwa Taman Nasional Bali Barat),**
3. **Pembinaan sumber alam** dan lingkungan hidup,
4. **Pengendalian pencemaran dan kerusakan** lingkungan,
5. **Penataan tempat rekreasi,**
6. **Pembangunan stasiun** Klimatologi dan Meteorologi,
7. **Pembangunan stasiun hujan,**
8. **Pemasangan alat pengukur** polusi udara,
9. **Pengadaan/pemasangan** alat-alat; magnit bumi listrik, gravinmetri dan lonossonde,
10. Pembangunan radio cuaca.

7. Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi dan sebaliknya usaha mengadakan perumahan yang layak, tergantung dari keadaan kemampuan ekonomi. Diharapkan bahwa usaha-usaha peningkatan mutu perumahan dan lingkungannya, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan, dapat mencapai suatu taraf di mana sebagian besar masyarakat di Bali menempati rumah dan lingkungan yang sehat.

Keadaan perumahan di kota-kota dewasa ini di Bali sudah menunjukkan pertanda bahwa keadaan ekonomi rakyat cukup baik. Setelah dalam Pelita II program perumahan secara nasional digalakkan, di Bali tampak dalam berberapa tahun ini banyak mengalamai kemajuan, misalnya bertambahnya pembangunan rumah baru, terutama melalui KPR-BTN, Papan Sejahtera dan Perum Perumnas.

Walaupun demikian, karena pertambahan jumlah penduduk, perumahan di kota-kota di Bali terasa masih kurang. Juga masih terdapat rumah-rumah yang kurang memiliki syarat, bila dilihat dari segi kenyamanan, kesehatan dan lingkungan.

Untuk itu dalam Pelita III pemerintah, berusaha membangun pemukiman dan pengadaan perumahan rakyat di perkotaan.

Di sepuluh kota, tahun 1978/1980 dibangun pemukiman penduduk melalui proyek perintis perbaikan kampung melalui dana APBN, untuk 7.500 jiwa, diatas areal 20 Ha. Tahun berikutnya jumlahnya ditingkatkan untuk 12.500 jiwa. Di akhir Pelita III melalui proyek ini dibangun pemukiman untuk 69.700 jiwa, diatas areal 222 Ha. Lihat Tabel IV-12.

Tabel / *Table IV — 12*

PERINTIS PERBAIKAN KAMPUNG PROPINSI BALI DANA APBN
VILLAGE IMPROVEMENT PILOT PROJECT, BALI PROVINCE APBN FUNDS

Kota / *Town*	1978/1980 Luas Ha / *Area Ha*	1978/1980 Penduduk orang / *Population People*	1980/1981 Luas Ha / *Area Ha*	1980/1981 Penduduk orang / *Population People*	1981/1982 Luas Ha / *Area Ha*	1981/1982 Penduduk orang / *Population People*	1982/1983 Luas Ha / *Area*	1982/1983 Penduduk orang / *Population*	1983/1984 Luas Ha / *Area*	1983/1984 Penduduk orang / *Population*
Sanur	30	7.500	30	7.500	—	—	—	—	—	—
Ambapura	—	—	10	2.500	10	2.500	10	2.500	10	2.500
Singaraja	—	—	—	—	10	2.500	20	5.000	10	2.500
Tabanan	—	—	—	—	10	2.500	20	5.000	10	2.500
K u t a	—	—	10	2.500	20	2.500	10	2.500	10	2.500
Denpasar	—	—	—	—	43	15.050	165	57.750	142	49.700
Negara	—	—	—	—	—	—	20	5.000	10	2.500
Gianvar	—	—	—	—	—	—	10	2.500	10	2.500
Bangli	—	—	—	—	—	—	10	2.500	10	2.500
Klungkung	—	—	—	—	—	—	10	2.500	10	2.500
10 Kota	30	7.500	50	12.500	93	25.050	275	85.250	222	69.700

Usaha-usaha peningkatan mutu pemukiman di pedesaan di Bali, juga mengalami beberapa kemajuan, dalam Pelita III, baik yang melalui Dinas PU Propinsi Dati I, Kanwil Depsos dan Dit Bangdes.

Melalui PU Propinsi Bali, tiap tahun dalam Pelita III banyak sudah dilakukan pemugaran perumahan desa. Jika pada tahun 1978/1979 di 24 desa dipugar sebanyak 990 rumah, tahun 1979/1980 naik menjadi 1.600 rumah di 42 desa, tahun berikutnya ada sebanyak 1.350 rumah di 45 desa. Pada akhir Pelita III dipugar 1.375 rumah di 55 desa.

Program yang dilakukan Kanwil Sosial dalam periode yang sama seluruhnya mencapai sekitar 753 unit. Sedangkan yang dipugar melalui Dit. Bangdes ada sekitar 1.960 unit. Lihat Tabel IV-13.

Mengenai keadaan air minum dan assainering/rioolering dapat dikemukakan bahwa fasilitas teknik penyehatan pada umumnya masih

In ten towns, during the 1978/1980 period, public residences were constructed through the village development pilot project with funds from APBN (The National Stage Budget) for 12,500 people. At the end of the Third Five-Year Development Plan, Residences wre built through this project for 69,700 people on a 222 Hectares area. See Table IV-12.

Effort to improve the quality public residences in rural areas in Bali have gained some progress during The Third Five-Year Development Plan, namely those efforts made through the First Level Region Office of the Dept. of Public Works, Regional Office of the Dept. of Social Affairs, and the Directorate of Village Development.

Through Bali Provincial Office of Public Works numerous village housing restorations were made during The Third Five Year Development Plan. IN 1978/1979 period 990 houses were restored in 24 villages, and in the 1979/1980 period the number increased to 1,600 houses in 42 villages, then in the following year 1,350 houses in 45 villages.
At the end of Third Five-Year Development Plan, 1,375 houses were restored in 55 villages.

The program executed by Regional Office of the Dept. of Social Affairs during the same period achieved about a total of 753 units. Whereas the number of houses restored through Village Development Directorate were 1,960 units (Table IV - 13).

As to drinking water as well as sanitation/sewerage condition, it can be stated that in general the sanitation technique facilities still do not meet the requirements in accordance with the society needs. The inadequacy of sanitation technique facilities is particularly experienced in the case of drinking water and sewage in areas like tourism objects and densely-populated part of towns.

The Development in the Public Housing and Residence Sector to enhance public prosperity in conformity with the basic needs in executed with an emphasis on the improvement towards proper life standard for most people of lower income. The implementation of the development is carried out in a more guided and integrated way, keeping in mind various relevant factors such as urban and rural land usage, expenses, work opportunity expansion, environment sanitation, local construction material potency, and so forth. Basically, the construction of Public Housing, clean water supply and Residence environment sanitation are responsibility of the society itself, whereas the government's obligation in this regard is limited to directing, regulating, guiding as well as supplying other various subsidiary and incentive facilities that can boost development in this field.

8. Law

Law Development in Bali is generally related with regional law which is stimultaneously related to the government policy and regional development.

The regional law development is basically directed towards Legal Order, government, and development in the long run. From that point of view, it is of primary importance to escalate efforts in constituting laws to promote regional government and development.

Furthermore Law Development is intended to preserve peace, order, and

belum memenuhi syarat, sesuai dengan keperluan masyarakat. Kekurangan fasilitas teknik penyehatan tersebut lebih-lebih terasa dalam hal air minum dan persampahan, yang sangat dirasakan di obyek-obyek pariwisata, bagian kota yang padat penduduknya.

Pembangunan di sektor Perumahan Rakyak dan Pemukiman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan meningkatnya keperluan pokok, diarahkan dengan penekanan pada peningkatan mutu kehidupan yang layak bagi sebagian besar rakyat berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan pembangunannya diusahakan secara lebih terarah dan terpadu, dengan memperhatikan berbagai hal yang berkaitan, seperti tata guna tanah perkotaan dan pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, potensi bahan bangunan lokal serta berbagai unsur yang lain. Pada dasarnya pembangunan perumahan rakyat, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, sedangkan kewajiban Pemerintah dalam hubungan ini adalah terbatas pada pembinaan, peraturan, pembimbingan, serta pemberian berbagai fasilitas bantuan dan perangsangan lainnya, yang dapat lebih mendorong pembangunan di dalam bidang ini.

8. Hukum

Pembangunan Hukum di Bali pada umumnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan daerah yang sekaligus dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pembinaan peraturan perundang-undangan daerah pada dasarnya pembinaan dalam rangka peningkatan tertib hukum, pemerintahan dan pembangunan dalam jangkauan jangka panjang. Dengan bertitik-tolak dari pikiran tersebut, maka yang pertama-tama perlu ditingkatkan adalah kegiatan usaha penyusunan peraturan perundang-undangan guna menunjang pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selain itu pembangunan hukum ditujukan untuk memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk masyarakat, agar dapat lebih mengerti akan hukum.

a. Penegakan dan Pembinaan Hukum

Kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan daerah pertama-tama ditujukan guna peningkatan tertib pemerintahan, pembangunan dan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka ini maka diusahakan penyempurnaan serta koordinasi antara instansi penegakan hukum di daerah.

Kegiatan-kegiatan penegakan hukum di Bali selama periode Pelita III senantiasa mengalami kemajuan, walaupun disana-sini masih banyak terdapat beberapa kelemahan.

Jumlah perkara pidana yang dapat diputuskan dalam periode 1980 sampai dengan 1984 mencapai sekitar 162.46% perkara, dalam periode yang sama perkara pidana yang diputuskan mencapai 5.368 perkara dari 5.505 perkara yang masuk. Lihat Tabel IV-15 dan IV-16.

Tabel / *Table IV — 13*

PEMUGARAN PERUMAHAN DESA
VILLAGE HOUSING RESTORATION

Tahun *Year*	**Pu. Prop. Bali** *Public Works*	**Kanwil Sosial** *Regional Office*	
1978/1979	24 Desa /*Villages*		3 Desa /*Villages*
	990 Rumah /*Houses*	62 Unit /*units*	120 Unit /*Villages*
1979/1980	42 Desa /*Villages*		11 Desa /*Villages*
	1600 Rumah /*Houses*	155 Unit /*units*	440 Unit /*units*
1980/1981	45 Desa /*Villages*		11 Desa /*Villages*
	1350 Rumah /*Houses*	173 Unit /*Villages*	440 Unit /*Villages*
1981/1982	46 Desa /*Villages*		11 Desa /*Villages*
	1190 Rumah /*Houses*	213 Unit /*units*	440 Unit /*units*
1982/1983	55 Desa /*Villages*		13 Desa /*Villages*
	1375 Rumah /*Houses*	150 Unit /*units*	520 Unit /*units*

harmony within the society. It is intended for the society to get to know more about Law.

a. Enforcing and Developing Law

Regional Law enforcement activities are mainly aimed at improving order in government and development, as well as legal security within the society. Consequently every effort is made to bring perfecttion of all Law Enforcement Agencies in the region, and to bring about coordination among them.

Law Enforcing Activities in Bali during The Third Five-Year Development Plan made constant progress, although here and there a good number of weakness could still be found.

The number of criminal cases judged within the period between 1980 and 1984 was about a total of 162,463, and within the same period criminal cases that were judged numbered up to 5,368 out of 5,505 incoming cases. (See Table IV-14, and for appealed cases see Table IV-15).

Besides this, rules and regulations of Law in the region were made to keep up with social development, and to socialize law, law counselling was carried out as a result of the previous stages of The Five-Year Development Plan.

Activities to be launced during the Fourth Five-Year Development Plan are as follows.

The primary target of the Regional law development activities is the establishment of Regional law in accordance with Regional government and development, among others : Enacting Regional laws based on Regional interests and needs; Researching and Revising Regional laws that lack compatibility with current situation; Continuing to make inventories and documentations of First/Second Level Region Laws, of written customary/religious laws, and composing directory/Compilation of laws of First/Second Level Region; Providing judicial assistance and law counselings, researching and

Tabel / *Table IV — 14*

JUMLAH PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI BALI TAHUN 1980 - 1984
NUMBER OF RECEIVED CRIMINAL AND CIVIL CASES AND JUDGED BY BALI DISTRICT COURT YEARS 1980 - 1984

Tahun *Year*	P I D A N A / *CRIMINAL*				P E R D A T A / *CIVIL*			
	Sisa bulan lalu (akhir Desember) *Previous months (end December)*	yang diputus *Judged*	yang masuk *Received*	sisa akhir bulan *End month Remainders*	Sisa akhir *Last Remainders*	yang masuk *Received*	yang diputus *Judged*	sisa akhir bulan *End month Remainders*
1980	897	24.257	24.395	759	—	1.103	1.111	—
1981	759	37.743	38.001	501	—	975	982	258
1982	501	34.239	34.390	350	257	1.069	1.092	234
1983	350	32.661	32.723	288	234	1.122	1.127	229
1984	288	32.900	32.954	294	229	1.236	1.286	209

• Data tidak ada *No data*

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Kantor Statistik Propinsi Bali 1984

Source : Adapted from Report Book of Office of Statistics of Bali Province 1984.

Selain itu peraturan dan ketentuan hukum di daerah diusahakan agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat, juga untuk memasyarakatkan hukum kegiatan penyuluhan hukum sebagai hasil dari Pelita-Pelita sebelumnya, kegiatan yang ditempuh dalam Repelita IV ialah :

Di dalam kegiatan pembinaan peraturan perundang-undangan Daerah pertama-tama yang akan diusahakan adalah penetapan per-

making inventories of law disputes; Promoting efforts to compile Central Laws and Government and Development; Advancing legal knowledge and skill for employees/Level I/II Regional Administration Officials, through refresher courses and consultations (with Central and Regional Officials).

In the effort to enforce Regional regulations of Laws, the following steps are taken : Setting up handbooks/manuals for law enforcement agencies in

Tabel / ***Table IV — 15***

JUMLAH PENYELESAIAN BANDING PERKARA PERDATA DAN PIDANA OLEH PENGADILAN TINGGI TAHUN 1980-1984

NUMBER OF CIVIL AND CRIMINAL APPEALED CASES SETTLED BY TRIBUNAL OF APPEAL, YEARS 1980-1984

Tahun *Year*	Tunggakan Banding *Appeals in Arrears*		Tambahan Banding *Fresh Appeals*		Banding yang diputus *Judged Appeals*		Sisa Banding *Remainding Appeals*	
		Pidana *Criminal*	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*
1980	42	8	364	55	369	56	37	7
1981	37	7	407	90	385	80	59	17
1982	59	17	403	79	412	89	23*)	4x)
1983	23	4	179	71	185	70	17	5
1984	17	5	170	96	151	87	36	12

Keterangan / ***Note :***

*) *27 Perkara diserahkan ke Pengadilan Tinggi Mataram*
27 Cases were referred to Mataram Tribun of Appeal

x) *3 Perkara diserahkan ke Pengadilan Tinggi Mataram*
3 Cases were referred to Mataram Tribun of Appeal

Sumber *Pengadilan Tinggi Denpasar.*
Source : Denpasar Tribunal of Appeal

aturan perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Daerah antara lain : Penetapan peraturan perundang-undangan Daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; Penetapan peraturan perundang-undangan Daerah berdasarkan kepentingan dan keperluan Daerah; Penelitian dan peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini; Melanjutkan usaha inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan Daerah Tingkat I/II, hukum Adat/agama yang tertulis dan penyusunan buku petunjuk/Himpunan peraturan perundang-undangan Daerah Tingkat I/II; Memberikan bantuan hukum, penyuluhan hukum, penelitian dan menginventarisasi sengketa-sengketa hukum; Meningkatkan usaha-usaha penyusunan/penghimpunan peraturan perundang-undangan Pusat mengenai bidang Pemerintahan dan Pembangunan; Meningkatkan pengetahuan/keterampilan di bidang hukum bagi para pegawai/Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat I/II, dengan penataran-penataran dan konsultasi-konsultasi (dengan pejabat Pusat dan Daerah).

Dalam usaha menegakkan peraturan perundang-undangan Daerah, maka diambil langkah-langkah; Penyusunan buku-buku pegangan/pedoman bagi para penegak hukum pada umumnya dan khususnya bagi penegak peraturan perundang-undangan Daerah; Mengadakan penataran bagi para pejabat-pejabat Daerah sampai dengan ke Tingkat Kecamatan; Mengadakan penerangan/penyuluhan kepada masyarakat atas permasalahan yang kritis, antara lain mengenai : pengelolaan/pelestarian lingkungan hidup; Memberikan bantuan hukum terhadap sengketa-sengketa yang timbul.

Segi formal peraturan perundang-undangan Daerah meliputi : perumusan, penelitian, pengesahan, pengundangan, dan penertiban Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah serta peninjauan kembali peraturan perundang-undangan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan. Penerbitan Lembaran/Tambahan Lembaran Daerah ini secepatnya dilakukan dan pada saat yang tepat serta diumumkan seluas mungkin dengan menggunakan mass media yang ada/dibuat khusus untuk itu sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

b. Pembinaan Hukum Adat di Bali

Pengaruh hukum adat bagi masyarakat Bali masih kuat. Hal itu disebabkan oleh pengaruh kebudayaan dan Agama Hindu yang membentuk segala sistem kemasyarakatan di Bali sangat terpelihara dengan baik, tapi sebagai aturan yang dilandasi oleh nilai dan norma kehidupan yang ada dalam masyarakat Bali, semua gejala hukum yang berkembang mendapat tempat pula seiring dengan perkembangan masyarakat sendiri.

Adapun wujud Hukum Adat di Bali bisa jelas tampak pada "Desa Adat" yang merupakan persekutuan teritorial atas kepentingan bersama. Desa adat bahkan juga merupakan persekutuan dan kesamaan kepercayaan terhadap Tuhan. Dengan demikian dalam persekutuan hukum adat di Bali seperti terlihat pada desa adat, memiliki tiga unsur yang saling berkaitan, yakni **wilayah,** masyarakat dan **pura** tempat pemujaan terhadap Tuhan (Hyang Widi).

general and Regional law enforcement agencies in particular; Organizing refresher courses for Regional Officials up to Kecamatan (Subdistrict) Level; Providing the society with information/counseling on critical problems, such as : management/conservation of living space; Supplying judicial assistance in case of arising disputes.

The formal aspect of Regional regulations of law comprises : formulation, research, ratification, legislation, and restoration of Regional Statute Book and Regional Statute Book Appendix, and Revision of Regional regulations of law which no longer measure up to the growth of government and development. The publication of the Regional Statute Book/Appendix should be issued as soon as possible and the right time, and should be made public as widely as possible through existing mass media/exclusive journal to keep the society well-informed.

b. Development of Customary Law in Bali

Customary Law still exercises a strong influence upon Balinese society. This phenomenon results from the power of Hindu culture and religion that safeguards all social systems in Bali, but on the other hand Customary Law as regulations based on values and norms inherent in the Balinese society allows all law phenomena to take place in harmony with the development of the society itself.

The presence of Customary Law can clearly be seen at "Desa Adat" (Customary Village) functioning as a territorial fellowship of common interest. Customary Village even functions as fellowship of the same belief in God. Therefore the customary law fellowship in Bali as seen at customary village has three interrelated elements, namely ***territory, society,*** *and* ***pura*** *which is the place of worship to God (Hyang Widi).*

Another factor that plays an important role in the formation of cultural Law in Bali is the Hindu literature such as ***Purwadigama, Adigama, Sasana, Kutaramanawa, Dewagama, Dewadanda, Dharmaupapati, Nagarakrama,*** *ets. Based on Customary Law development and viewed from their sequence, Customary Law is confirmed by* ***Pasmara*** *and* ***Awig-awig.*** *Both of them have been written on the basis of* ***Sastragama*** *and* ***Sasana.*** *The last two originate from* ***Adigama*** *and* ***Kutaramanawa,*** *and the latter is based on* ***Purwadigama.*** *The source of Purwadigama is* ***Manawadharmasastra*** *which is inspired by* ***Karmakandha*** *from the holy book Weda (Veda). For that reason Customary Law and custom in Bali cannot be separated from the Hindu Religion. Social Life, religion, and other activities are handled by customary institutions such as* ***desa adat, banjar,*** *and* ***subak.*** *The close relationship between custom and religion leads the society through a harmonious, tranquil, and peaceful life, resulting in an atmosphere of firm unity and mutual cooperation.*

The Udayana University plays a significant part in developing Customary Law, especially in composing Awig-awig which basically contains three subject matters :

- ***Sukerta tata palemahan,*** *which denotes order and dissipline in village territory as well as the structure residential patterns for village members.*
- ***Sukerta tata pawongan,*** *order in the community, and*
- ***Sukerta tata perhyangan,*** *that which governs the procedure of exircising religion.*

Traditional Village in Bali enjoys a vast autonomy and is secured by Article 18 of the 1945 Constitution. However, its laws and regulations are made

Hal lain yang banyak melandasi terbentuknya Hukum Adat di Bali ialah sastra Hindu seperti **Purwadigama, Adigama, Agama, Sasana, Kutaramanawa, Dewagama, Dewadanda, Dharmaupapati, Nagarakrama** dan lain-lain. Berdasarkan perkembangan Hukum Adat dan jika dilihat dari segi deretannya maka Hukum Adat dikukuhkan oleh Paswara dan Awig-awig. Keduanya disusun berlandaskan Sastragama dan Sasana. Yang dua ini dibentuk pula dari Adigama dan Kutaramanawa dan yang terakhir ini disusun dari Purwadigama. Purwadigama disusun berlandaskan Manawadharmasastra yang disusun berdasarkan Karmakandha dari kitab suci Weda. Itulah sebabnya Hukum Adat dan adat di Bali, tidak bisa dipisah dengan Agama Hindu. Kehidupan masyarakat, agama dan kegiatan lainnya ditangani oleh lembaga adat seperti **desa adat, banjar,** dan **subak.** Erat jalinan adat dan agama di Bali membuat masyarakat hidup dalam suasana rukun, tenteram, damai yang menyebabkan kokohnya persatuan dan penuh dengan suasana kehidupan gotong-royong.

Peranan Universitas Udaya dalam membina Hukum Adat di Bali cukup besar terutama dalam menyusun awig-awig pada dasarnya memang memuat tiga hal :

- **Sukerta tata palemahan,** yang artinya tata tertib di wilayah desa dan struktur pola menetap anggota desa;
- **Sukerta tata pawongan,** tata tertib dalam masyarakat dan
- **Sukerta tata perhyangan,** yang mengatur tata tertib melaksanakan agama.

Desa adat di Bali mempunyai otonomi yang luas dan dijamin oleh pasal 18 UUD 1945. Kendati demikian aturan dan hukumnya senantiasa diarahkan agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

9. Keamanan dan Ketertiban

Berkat hasil-hasil pembangunan dalam Pelita sebelumnya keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali di segala sektor menunjukkan pengaruh yang positif maupun yang negatif.

Walaupun demikian, politik dalam pelaksanaan pembangunannya selama ini untuk daerah Bali cukup mantap terkendali, sehingga tercipta suatu keadaan di mana pembangunan dapat dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar.

Mengenai situasi Kamtibmas di Bali seperti tergambar dari berbagai hasil pembinaan hukum dan penegakan hukum jelas dapat terlihat, umumnya jenis kasus kejahatan dan kenakalan terjadi sebagaimana dilampirkan oleh aparat penegak hukum menunjukkan stabilitas di daerah tetap terjaga.

Sebagai gambaran misalnya untuk jenis kejahatan pencurian pada tahun 1983 yang dilaporkan sebanyak 2.498 dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 346. Sedangkan pada tahun 1984 jumlah pencurian menurun drastis, mencapai 424 dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 105.

Ini terbukti berkat sasaran yang ditujukan pemerintah dalam hal penertiban, untuk selalu terpeliharanya dan terkendalinya suasana tertib dan aman guna menunjang kelangsungan pembangunan di segala bidang.

Sedangkan pengamanan di bidang ekonomi mempunyai sasaran peningkatan pengamanan penyediaan sembilan bahan pokok dan barang-barang primer serta pengamanan, pengungkapan dan penelitian tentang kasus-kasus yang menghambat peningkatan produksi khususnya sembilan bahan pokok.

Selain itu pengawasan orang asing dan pengamanan sosial budaya, agar dapat menghindari adanya kerawanan-kerawanan sebagai akibat masuknya orang-orang asing yang berpengaruh terhadap bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pada dasarnya fungsi keamanan dan ketertiban pada umumnya tidak saja dibebankan pada ABRI khususnya POLRI. Kepala Wilayah dalam melaksanakan fungsi keamanan dan ketertiban dibantu para Panglima/Komandan Kepala ABRI, yang bertugas di wilayahnya. Disamping itu Kepala Wilayah juga mempunyai aparat dalam bidang ini, yakni Pertahanan Sipil dan Polisi Pamong Praja.

Maksud dan tujuan pembangunan Pertahanan Sipil sebagai pedoman dan pengarahan pembinaan, pengembangan. Pertahanan Sipil selaku Aparatur Pemerintah Tingkat I Bali dan sebagai operasional sampai ke tingkat desa dalam menjalankan tugas, melanjutkan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Juli 1974, No UP 34/14. No 44 - 1186 di mana ditiap Kecamatan terdapat :
1. Menteri Polisi Pamong Praja : 1 orang
2. Agen Kepala, 3. Agen Polisi Pamong Praja : 5 orang.
Sehingga di 51 Kecamatan di Bali menurut formasinya berjumlah 306 orang Polisi Pamong Praja.

in such a manner so as not to contradict the Pancasila and other laws and regulations applicable in Indonesia.

9. Security and Order

As a result of the previous Five Year Development Plans the security and order in Bali, in all sectors, show positive and negative effects.

In spite of this, the implementation of development all the while shows that there is political stability in Bali, which creates a condition in which development can be carried out safely, orderly and smoothly.

Regarding public order in Bali, as a result of the promotion of law and its enforcement, data issued by the law enforcement agency shows that it is well under control.

For example, the number of thivery reported in 1983 amounted to 2,498 cases, of which 346 cases were solved. There was a remarkable drop in 1984 to 424 cases, of which 105 cases were solved.

This improvement in public order came as result of the target set by the government in social order, that the maintenance of order and security is conducive to the continued development in all areas of activity.

In the field of economy, the target set is to secure the supply of nine staple foods and primary goods and to expose and study cases that stunt the growth of production particularly that of nine staple foods.

Additionally, the supervision of foreigners and of social culture is designed to prevent critical situations in the field of economy, politics, social culture and defense and security, due to the influx of foreign visitors.

Basically, the safekeeping of security and order does not lie solely on the shoulders of the Armed Forces, particularly the Police. The Head of an Area will be supported in the safekeeping of security and order by the Commander of the Armed Forces in charge of the area. In Addition, the Head of the Area has his own men in this regard, the Civil Defense and Civil Police.

The purpose of building Civil Defense is described in the guidebook for promoting, developing Civil Defense as an arm of the Province of Bali, which is operational to the village level in performing its mission, which is to provide security and order to the community.

Based on the Decree of the Minister of the Interior No UP 34/14. No 44 - 1186 dated July 30, 1974, it is stipulated that every subdistrict shall have :
1. One civil police supervisor
2. Fife policemen/assistant policemen.
Thus, in 51 subdistricts of Bali, there are 306 civil policemen.

10. Information, the Press, and Social Communication

In view of the results achieved during the Third Five Year Plan, Information activity in general has made some progress in terms of quality and quantity. However, some obstacles in the form of software and hardware must be overcome yet in stages, in proportion with the funds available from the Government. For this reason, solution to matters which became obstacles and unsolved problems in the Third Five Year Plan has been worked out and formulated in the Fourth Five Year Plan.

Considering that the flow of information which reached the rural areas amounted to about 20%, the information policy made is directed to diffuse information evenly to the rural areas through information media - Public information Centre, Radio, Television, Movie Film, Press, Publication, Display, Face-to-Face Meeting and Sociodrama. In order to stimulate the active participation of the community in national development, it is necessary to awaken their conciousness through information media like Public Information Centre, radio, television, movie film, press, publication, face-to-face information meeting, display, sociodrama and through the promotion of sources of information like news agency and information institutions owned by the community.

In 1958, in line with the change of administration then, Bali became a separate province, which affected its information agency accordingly. The Information Agency of the Province of Bali was in charge of eight district information offices. Eventually, with the transformation of government Ministries into Government Departments, the information Agency became the Department of Information.

The main task of the Information Department is to carry out a part of the general task of the Government and to develop the Information sector; thus, the mission of the Information Department is inseparable from the objective of development, and from the National Strategy. The mission of the information Department, therefore, is to consolidate the situation in the field in order to smoothen the way for the field operators in the field as they carry out their jobs assigned by their offices. We have to work hard because the people expect concrete results from the government's efforts. Meanwhile we have the obligation to impart guidance and direction to them so that they are not passive towards the national development.

The face-to-face information meeting plays a vital role, particularly in the rural areas, and this requires a large number of operators, Informers,

10. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Ditinjau dari hasil pelaksanaan program kerja pada Repelita III secara umum kegiatan penerangan telah mencapai kemajuan, baik dari kualitas maupun kuantitas. Namun harus diakui bahwa hambatan-hambatan baik perangkat lunak (soft ware), maupun perangkat keras (hard ware) masih perlu diatasi secara bertahap, sesuai dengan keadaan dana yang dapat disediakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu hal-hal yang masih merupakan hambatan dan permasalahan yang belum terpecahkan dalam Repelita III dirumuskan cara mengatasinya dalam Pelita IV.

Mengingat arus penerangan yang masuk ke daerah pedesaan hanya berkisar 20%, maka dalam hal ini kebijaksanaan penerangan diarahkan untuk pemerataan informasi sampai ke desa-desa melalui media penerangan, yaitu Puspenmas, radio, televisi, film, pers, penerbitan, pameran penerangan tatap muka dan sosiodrama. Supaya kebijaksanaan tersebut dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan maka konsekuensinya harus dibangun dan ditingkatkan melalui sarana penerangan seperti Puspenmas, radio, televisi, film, pers penerbitan penerangan tatap muka, pameran, sosiodrama dan pembinaan sumber-sumber informasi seperti, kantor berita dan lembaga-lembaga penerangan milik masyarakat.

Pada tahun 1958, sesuai dengan perubahan pemerintahan pada waktu itu, maka Bali berdiri menjadi satu propinsi tersendiri, yang sekaligus mempengaruhi jawatan penerangannya. Jawatan penerangan propinsi Bali membawahi delapan jawatan penerangan kabupaten. Akhirnya dengan peraturan yang menyangkut status kementrian menjadi Departemen, maka jawatan penerangan berubah menjadi Departemen Penerangan.

Departemen Penerangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang penerangan, sehingga tujuan Departemen Penerangan tidak terlepas dari tujuan Pembangunan, bahkan juga strategi Nasional. Dengan demikian Departemen Penerangan mendapat tugas untuk mengkonsolidasikan situasi di lapangan, dalam rangka melicinkan jalan bagi para petugas lapangan di bidang teknis yang menjadi kewajiban masing-masing instansinya. Dalam hubungan ini kepada kita dituntut kerja keras karena rakyat selalu menunggu hasil-hasil yang konkret dari usaha-usaha pemerintah itu. Di lain pihak kita wajib memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mereka, sehingga mereka tidak pasif terhadap pembangunan.

Penerangan tatap muka yang selama ini sangat besar peranannya, terutama di pedesaan, memerlukan banyak tenaga pelaksana yakni juru Penerang yang dewasa ini di Bali jumlahnya terbatas, jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada. Juru penerang disamping harus menjadi komunikator yang baik, juga diharapkan mampu menjadi organisator penerangan, sehingga terlaksana kegiatan penerangan melalui orang lain. Melalui siaran radio dan televisi dapat diciptakan kelompok pendengar dan pirsawan dan melalui surat kabar dapat diciptakan kelompok pembaca, dimana dalam hal ini Juru Penerang brfungsi sebagai pembimbing dan pengarah. Komunikasi tatap muka diselenggarakan dalam berbagai bentuk, seperti ceramah, sarasehan, diskusi, anjangsana dan sebagainya, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu ditunjang dengan berbagai alat bantu audiovisual.

Kegiatan penerangan yang lain ialah pameran. Pameran pembangunan yang dilaksanakan Departemen Penerangan selama ini sampai ke Tingkat Kabupaten merupakan laporan visual pembangunan dan merupakan wujud keterpaduan penerangan antara unsur penerangan/kehumasan instansi lain. Pameran pembangunan perlu ditingkatkan mutu dan intensitas serta keterpaduannya, termasuk mengikutsertakan peranan masyarakat secara tepat.

Pertunjukan rakyat disamping mampu menyampaikan informasi dan motivasi sambil menghibur, juga merupakan media yang sangat berpengaruh di Bali. Selain karena kekayaan seni budayanya, penanganan media tersebut selama ini sangat menonjol didukung oleh sarana yang tersedia di sini. Dalam hubungannya dengan penerangan pembangunan, pertunjukan rakyat melalui lakon dan dialognya dapat memberi contoh kepada khalayak mengenai cara-cara yang harus ditempuh untuk mensukseskan pembangunan.

Gairah partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan dalam arti ikut sertanya mereka memikul tanggungjawab memikirkan dan memecahkan masalah-masalah pembangunan. Daerah demikian sudah seyogyanya arus penerangan tidak saja mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas dalam bentuk arus balik. Untuk itu perlu dikembangkan kegiatan komunikasi sosial yang bersifat timbal balik antara Pemerintah dengan masyarakat yang menerima pesan dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Dalam pada itu komunikasi sosial hendaknya dilaksanakan secara bebas, terpadu, terarah, berdasarkan itikad jujur dan bertanggung jawab, yang diliputi

whose number in Bali is rather small when compared with the number of villages there. Besides being a good communicator, an Informer has to be a capable organizer who is able to disseminate information through other people. By means of radio and television, groups of listeners can be formed, and by means of newspapers, groups of readers can be organized, in which groups the Informer acts as their guide and director. Face-to-face communication is carried out in the form of lecture, symposium, discussion, tour, etc. To make it more efficient and effective, it is necessary to support it with audiovisual equipment.

Another information activity is display. Display of development organized by the Information Department reached as far as the districts in the form of visual report of the national development, and it constituted an integrated effort between Information/Public Relations operations of other offices. The quality and intensity of display on national development must be improved, including the participation of the community.

Popular show, besides supplying information, motivation, and entertainment, is an influential medium in Bali. Being rich in art and culture, this medium receives the strong support of local facility. With regard to information on national development, popular show can, through its story and dialoque, supply examples to the community concerning ways to be taken to achieve the goals of development.

The community's enthusiasm to participate in the national development has to be stimulated in terms of their sharing the responsibility to study and solve problems of development. Consequently, the flow of information should come not only from top to bottom, but also from bottom to top in the form of feedback. For this purpose it is necessary to expand reciprocal social communication between the Government and the Community as receiver of the message, and between various groups in the community. Such sosial communication should be carried out freely, in an integrated manner, with goodwill and responsibility, characterized by mutual trust between the government and the Community and by goodwill on account of social interest.

a. Newspaper

To arouse the spirit of dedication to the national cause, and to strengthen the unity and cohesion of the nation, to imbue a sense of responsibility and national discipline, to stimulate the participation of the community in the development, it is necessary to build up a sound press.

Press or newspaper is an effective printed medium in collecting news and messages of development. To enhance the role of press in rural development, more newspapers have been sent to the rural areas. Rural newspapers are intended to arouse the conciousness and interest of the rural areas to read, in an effort to improve the knowledge and skill of the community in Bali.

This project which was begun in 1978 is intended also to publicize the development activities in the rural areas in the rural newspapers. The distribution of rural newspapers is carried out in Bali through Bali Post, Nusra, and Karya Bhakti.

The rural newspaper program handled by the Department of Information has played a significant role in bringing progress to the press in Bali.

The first newspaper published in Bali took place during the Japanese occupation and it was the "Bali Sinbun". After the transfer of sovereignty to Indonesia, "Peninjau", and "Suara Indonesia" began to be published, and these later became "Suluh Marhaen" and "Bali Post".

For a comparison relating to the progress of printed media, the number of Jakarta newspapers which circulated in Bali in 1975 was as follows :

1. Kompas	*1,070 copies*
2. Merdeka	*386 copies*
3. Sinar Harapan	*692 copies*
4. Berita Yudha	*749 copies*
5. Suara Karya	*982 copies*
6. Berita Buana	*279 copies*
While the number of local newspapers was :	
1. Bali Post	*3,594 copies*
2. Angkatan Bersenjata, Nusra edition	*2,347 copies*

Today, newspapers which are published in Bali are the "Bali Post", "Nusa Tenggara", and "Karya Bhakti". The printing issue of these newspapers in 1984 was :

1. Bali Post	*20,152 copies*
2. Nusra	*11,500 copies*
3. Karya Bhakti	*10,000 copies*

The first printeries set up in Bali were Percetakan Bali, Siaran Indonesia and Universal press. Today there are sixty printing companies operating in Bali.

Press is an effective two-way means of communication between the government and the community and between the different communities. On this account, it is necessary to build up a development press which acts as distributor of news dispatches, comments to increase the knowledge of the community. By means of the development press, the community can be motivated and their self-reliance can be strengthened to build a better future. For this reason

rasa saling percaya mempercayai antara Pemerintah dengan masyarakat dan itikad baik atas dasar kepentingan sosial.

a. Surat Kabar

Dalam rangka menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggungjawab dan disiplin nasional serta menggairahkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, maka usaha mengembangkan pers yang sehat perlu ditingkatkan.

Pers atau surat kabar merupakan media cetak yang efektif dalam mengumpulkan berita dan pesan pembangunan. Untuk meningkatkan peranan pers dalam pembangunan di pedesaan, telah digalakkan koran masuk desa. Koran Masuk Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan minat baca di kalangan masyarakat pedesaan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Bali.

Proyek yang sudah berjalan dari tahun 1978 juga ditujukan agar kegiatan-kegiatan pembangunan di desa-desa diinformasikan melalui koran masuk desa. Penyebaran koran masuk desa di Bali antara lain melalui Bali Post, Nusra, Karya Bhakti.

Program KMD yang ditangani Departemen Penerangan selama ini jelas sangat besar peranannya dalam menumbuhkan kemajuan Pers di Bali.

Surat kabar yang pertama di Bali terbit pada zaman Jepang adalah "Bali Sinbun" pada zaman kedaulatan adalah "Peninjau", "Suara Indonesia" yang kemudian berubah menjadi "Suluh Marhaen" dan berubah menjadi Bali Post.

Sebagai bahan perbandingan yang berhubungan dengan perkembangan media pers, pada tahun 1975 terbitan pusat yang masuk ke Bali adalah sebagai berikut :

1. Kompas	1.070 eksemplar.
2. Merdeka	386 eksemplar.
3. Sinar Harapan	692 eksemplar.
4. Berita Yudha	749 eksemplar.
5. Suara Karya	982 eksemplar.
6. Berita Buana	279 eksemplar.

Sedangkan untuk edisi daerah adalah :

1. Bali Post	3.594 eksemplar.
2. Angkatan Bersenjata Edisi Nusra	2.347 eksemplar.

Dewasa ini media surat kabar yang terbit di Bali adalah "Bali Post", "Nusa Tenggara", dan "Karya Bhakti". Berdasarkan data tahun 1984 untuk masing-masing koran tersebut beroplag :

1. Bali Post	20.152 eksemplar.
2. Nusra	11.500 eksemplar.
3. Karya Bhakti	10.000 eksemplar.

Dalam hal percetakan, yang pertama di Bali adalah percetakan Bali, Siaran Indonesia dan Universal Press. Sampai sekarang di Bali terdapat 60 percetakan.

Pers merupakan sarana komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat yang efektif. Karenanya perlu juga dikembangkan Pers Pembangunan yang menjadi penyalur berita, ulasan dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat. Melalui pers pembangunan masyarakat dikembangkan motivasinya dan dipertebal kepercayaannya pada diri sendiri dalam membangun masa depan yang lebih baik. Untuk itu hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a. Pembinaan/Kerjasama antar wartawan.
b. Pendidikan dan latihan Penulis Pedesaan.
c. Peningkatan dan pemantapan KMD antara lain dengan lebih memantapkan pelaksanaan tugas Tim Pembina KMD.

b. R a d i o

Radio merupakan media yang paling cepat dapat menyampaikan pesan penerangan mengingat daya jangkauannya yang tidak mengenal batas geografis. Melalui RRI telah diintrodusir suatu sistem siaran pedesaan dalam rangka mengadakan pendekatan dengan masyarakat pedesaan yang disebut dengan siaran pedesaan.

Siaran pedesaan di Bali sejak lama diperkenalkan dengan membentuk kelompok pendengar siaran pedesaan. Kelompok ini dibentuk untuk memonitor siaran-siaran pedesaan yang dipancarkan oleh RRI khususnya dalam bidang penyuluhan. Namun dalam perkembangan selanjutnya materi siaran bukan saja mengenai masalah-masalah pertanian saja tetapi juga di bidang lainnya seperti industri, budaya, olah raga dan lain-lain.

RRI Denpasar didirikan tahun 1950 disamping itu terdapat pula RRI Singaraja dan 15 buah radio swasta nasional. Jumlah pegawai RRI yang ada di Bali sampai tahun terakhir Pelita III ada sebanyak 152 orang. Untuk efektifnya penerangan melalui radio, baik mutu, isi dan teknik

the following items need to be given adequate attention :

a. Promotion/cooperation among journalists.
b. Education and training or rural writers.
c. Improvement of rural newspaper, among others, by improving the operation of Promotion Team of Rural newspaper.

b. Radio

Radio is the fastest medium in disseminating information in view of its operating range which is not limited by geographical boundaries. A rural broadcast system has been introduced through RRI in an effort to reach rural community.

Rural broadcast in Bali has long been introduced by the formation of listeners' groups of rural broadcast. These groups are formed to monitor the rural broadcast by RRI, particularly its information program. In the later stage, the subjects broadcast are not limited to agricultural matters only, but include other areas like industry, culture, sports, and others.

RRI Denpasar was established in 1950. In addition, there is an RRI station in Singaraja and fifteen national private radio stations in Bali. The number of RRI employees in Bali by the end of the Third Five Year Plan was 152. For the dissemination of information through radio to be effective, its quality, substance, and presentation, must be improved along with their ability to provide the necessary support to their operation.

c. Television

At present, the local broadcast of TVRI Denpasar lasts for two hours, apart from the program it relays from TVRI Central in Jakarta. The program of TVRI Denpasar follows as a guideline TVRI's integrated program, the composition of which, by proportion, is as follows :

(1) information news, 25%, (2) religious education, 23%, (3) entertainment/art/culture, 47%, (4) others, 5%.

Nowadays, the entire Province of Bali is covered by TVRI broadcast by using two transmitters :

1. Bukit Bakung Transmitter which has a 5 Kw capacity and whose broadcast is directed to the southern part of Bali.
2. Bukit Penulisan (Kintamani) Transmitter which has a 1 Kw capacity to cover the northern part of Bali.

Reports received from Perum Pos and Giro relating to the number of television sets used in Bali from 1981 to 1985 are shown in Table IV-16.

TVRI Station in Denpasar has a local studio in which they produce local television programs, besides outdoor productions which use beautiful panorama as their backdrop, and the production of reports on development which requires the use of tv cameras right in the rural areas to be covered.

d. Movie Film

Movie film constitutes one of the most powerful media due to its audio-visual characteristics. In view of the small number of information film productions, it is necessary to increase the number, title as well as copy of movie film productions. Commercial film productions have to be promoted too in order to prevent any negative impact they may bring to the community. Likewise, rural movie film has to be promoted in terms of greater attention and supervision.

All the districts in Bali have their own cinemas, thus enabling the rural community to be entertained by movie film.

The number of cinemas in Bali up to 1985 shows no changes compared with that of the previous year. The category of cinemas in the Province of Bali is made by GPBSI Bali, which classifies all the cinemas into five category, AA, A, B, C, and D. Under this classification there are, in Bali, 15 cinemas of the AA, A, B, C category, 11 cinemas of the C category, and 4 of the B category. (See Table III-17).

This classification apparently does not reflect a professional model classification. Cinemas are grouped on the basis of certain facilities, the use of AC, fan, whether they are located in the centre of the town or out of town. Consequently, the Badung District is said to have AA class cinemas, while the other districts have only B class cinemas. However, the future prospect of cinemas in Bali is bright.

In general, considering the number of movie-goers in the last five years, there is an upward trend, an average of 10.18% growth a year.

The proceeds from the 39 cinemas in Bali in 1985 totalled Rp1 1 billion. which is a significant figure for the provincial administration. It represents an 18 percent increase over the previous year.

It is evident from the above table that movie film is the only information medium which shows a rapid growth in the Province of Bali.

There is an important fact regarding the number of movie-going public by the country of origin of the movie film they viewed, and the frequency of screening of the movie film according to its country of origin. If we study the number of movie goers, Indonesian Film productions drew the largest crowd since 1979. The ranks of imported movie films have been shifting

penyajian acara siaran, sejalan dengan penyempurnaan jangkauan siaran perlu pemantapan kemampuan unsur penunjang operasi siaran.

c. Televisi

Pada saat sekarang ini siaran-siaran lokal TVRI Stasiun Denpasar berlangsung selama 2 jam, disamping siaran-siaran relay dari TVRI Pusat Jakarta. Isi acara siaran TV stasiun Denpasar berpedoman kepada isi acara TVRI terpadu dimana perbandingan jenis siaran sebagai berikut : (1) berita penerangan 25%; (2) pendidikan agama 23%; (3) hiburan/seni/budaya 47%; (4) lain-lain 5%.

Pada saat ini keseluruhan Propinsi Bali telah dapat diliput TV dengan menggunakan dua buah pemancar yaitu :

1. Pemancar Bukit Bakung dengan kekuatan 5 Kw yang meliputi Bali Bagian Selatan.
2. Pemancar Bukit Penulisan (Kintamani) dengan kekuatan 1 Kw yang meliputi Bali Bagian Utara.

Dari laporan yang cidapat dari Perum Pos & Giro perkembangan pesawat TV yang ada di Bali dari tahun 1981-1985 dapat dilihat pada Tabel IV-16.

Studio TVRI Stasiun Denpasar mempunyai studio lokal dimana dilaksanakan produksi-produksi acara TV disamping pembuatan acara-acara di luar studio seperti acara-acara yang dilatarbelakangi dengan panorama yang indah-indah dan pembuatan laporan-laporan pembangunan dimana cameraman TV langsung turun ke daerah (desa) yang perlu diliput.

d. F i l m

Film merupakan salah satu media yang ampuh karena sifat audio-visualnya. Mengingat masih kurangnya produk-produk film penerangan, maka film penerangan perlu ditingkatkan jumlah, judul maupun copynya. Demikian juga terhadap film komersial pembinaannya perlu ditingkatkan sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat. Demikian juga pembinaan terhadap film masuk desa perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius.

Di Bali, seluruh kabupaten telah mempunyai gedung bioskop, sehingga masyarakat di pedesaan juga dapat menikmati hiburan melalui film.

Ternyata di Bali jumlah gedung bioskop sampai dengan tahun 1985 tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Klasifikasi gedung bioskop yang ada di Propinsi Bali dibuat sendiri oleh GPBSI Daerah Bali, dimana klasifikasinya dibuat lima kelas yaitu AA, A, B, C, dan D. Di Bali berdasarkan kriteria tersebut ada 15 buah gedung bioskop dengan klasifikasi AA, A, B, C; 11 kelas C dan 4 buah kelas B. Lihat Tabel IV-17.

Kelas tersebut nampaknya belum mencerminkan model klasifikasi yang profesional. Kelas hanya dibedakan berdasarkan beberapa fasilitas lokasi, seperti penggunaan AC, Fan, di pusat kota atau tidak, sehingga kesannya belum sempurna betul. Hal ini jelas kelihatan misalnya hanya di Kabupaten Badung terdapat gedung yang memiliki kelas AA, sedangkan kabupaten lainnya paling tinggi hanya kelas B. Namun demikian prospek kedepan bagi perkembangan perfilman di Bali tetap cerah.

Secara umum kalau dilihat perkembangan penonton selama 5 tahun, terlihat bahwa jumlah keseluruhan menunjukkan trend yang terus naik, rata-rata kenaikannya berkisar 10,18% per tahun.

Uang masuk yang dihasilkan oleh ke 39 gedung bioskop di Bali selama tahun 1985 tidak kurang dari Rp. 1,1 milyar. Suatu angka yang tidak kecil buat Pemerintah Daerah. Angka tersebut sudah merupakan peningkatan sekitar 18% dari tahun sebelumnya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Film merupakan satu-satunya media penerangan yang cukup pesat perkembangannya di Propinsi Bali.

Ada hal yang pokok mengenai jumlah penonton berdasarkan negara asal Film yang ditonton dan kemudian frekuensi pemutaran film menurut negara asal Film. Kalau kita perhatikan secara seksama bahwa penonton Film Indonesia dalam hal jumlah selalu menempati urutan pertama, bahkan sejak tahun 1979. Selanjutnya untuk Film impor kedudukannya selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan, pertama Film India kemudian digantikan oleh Film Amerika, Hongkong, Italia dan sebagainya.

Dari perkembangan data yang ada ternyata Film kita perkembangan jumlah penontonnya tidak merata. Sebagai contoh pada tahun 1980 penonton mencapai 480 rbu, kemudian pada tahun 1981 menurun menjadi 478 ribu, selanjutnya naik menjadi 634 ribu pada tahun 1983 dan pada tahun 1984 turun lagi menjadi 594 ribu. Lain halnya dengan film Amerika, dia merambat naik dengan pasti bahkan pada tahun 1985 melampaui Film India yang selama 4 tahun terakhir selalu unggul dari Film Amerika.

Tabel / *Table* IV — 16

BANYAKNYA PESAWAT TELEVISI DI PROPINSI DATI I BALI TAHUN 1981 - 1985
THE NUMBER OF TELEVISION SETS USED IN BALI 1981-1985

No.	Kabupaten *District*	TAHUN / *YEARS* 1981	1982	1983	1984	1985	%
1.	Jembrana	2.583	3.003	3.839	4.389	5.421	20,36
2.	Tabanan	4.676	5.817	8.702	11.110	13.341	30
3.	Badung	20.855	22.714	38.850	42.990	48.441	23,45
4.	Gianyar	1.845	2.100	4.206	4.535	5.463	31
5.	Klungkung	1.273	1.474	2.976	3.328	4.244	35
6.	Bangli	686	857	1.575	-1.776	2.243	34,47
7.	Buleleng	6.027	6.632	10.358	11.246	12.284	19,48
8.	Karangasem	938	1.173	2.097	2.167	2.443	27
	Jumlah/*Total*	38.883	43.770	72.603	81.541	93.880	24,65

Sumber : Daerah Pos X Bali
Source : Postal Area X Bali.

Tabel / *Table IV — 17*

KLASIFIKASI BIOSKOP MENURUT KELASNYA PER KABUPATEN
CATEGORY OF CINEMAS BY CLASS IN EACH DISTRICT

No.	Kabupaten *District*	Banyaknya *Quantity*	Kelas/Golongan *Category/Group*
1.	Jembrana	3	C
2.	Tabanan	7	C/D
3.	Badung	15	AA, A, B, C
4.	Gianyar	7	—
5.	Klungkung	1	C
6.	Bangli	1	—
7.	Karangasem	1	—
8.	Buleleng	4	B

Sumber : Biro Humas Sekwilda Tingkat I Bali.
Source : Secretariat of Bali Provincial Administration.

Tabel / *Table IV — 18*

JUMLAH BIOSKOP, KAPASITAS TEMPAT DUDUK DAN HASIL PENJUALAN KARCIS DI PROPINSI DATI I BALI TAHUN 1980 - 1984
NUMBER OF CINEMAS, SEATING CAPACITY, AND PROCEEDS FROM TICKET SALES IN BALI

No.	Tahun *Year*	JUMLAH / *Quantity* Bioskop *Cinema*	Tempat Duduk *Seating Capacity*	Hasil Penjualan Karcis *Proceeds from Ticket Sales*
1.	1980	22	13.817	306.113
2.	1981	24	15.109	417.501
3.	1982	25	15.511	691.138
4.	1983	26	20.463	857.310
5.	1984	39	23.382	937.634

Sumber : Biro Humas Sekwilda Tingkat I Bali
Source : Secretariat of Bali Provincial Administration.

according to the situations. Indian movies ranked first, followed by American, Hong Kong, Italian and other movies.

The available data also show that the number of viewers of our national films are not constant. For example, there were 480 thousand in 1980, then they decreased to 478 thousand in 1981, then they increased to 634 thousand in 1983, then they decreased again to 594 thousand in 1984. Unlike Indonesian films, American movies moved gradually but surely upward that in 1985 they were able to unseat Indian films which had ranked first in the past four years.

B A B / *CHAPTER V*

BALI MENUJU PULAU TAMAN

BALI STRIVING TO BECOME A PARK ISLAND

"BALI Menuju Pulau Taman" pada hakekatnya ialah sebuah konsepsi yang bersifat dinamik dan bertumpu pada ekologi sebagai kerangka pijakan. Dalam konsepsi yang terwujud sebagai suatu bentuk proses **(fenomena prosesual)** seperti itu, kedudukan faktor manusia dalam arti interaksi antara manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan lingkungannya menjadi amat penting.

Dalam kerangka global, sebenarnya negara maju maupun negara berkembang pada dasarnya masing-masing telah menghadapi masalah lingkungan hidup, walaupun dengan inti hakekat yang berbeda. Di negara-negara kategori maju kebanyakan persoalan lingkungan hidup merupakan dampak kemajuan ekonomi dan teknologi, sedangkan yang dihadapi negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alamnya dan bahkan seringkali gabungan antara keduanya.

Masalah lingkungan hidup di Indonesia mulai dibicarakan seputar tahun tujuh puluhan. Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup, yakni : kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang cukup serius; keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber-sumber alam yang bisa diolah secara sinambung dalam proses pembangunan jangka panjang; Dan sebab yang bersifat ideal, yaitu kemauan untuk membangun.

Dalam dimensi yang berskala mikro yaitu untuk daerah Bali, konsepsi Bali menuju Pulau Taman telah dikembangkan sebagai satu konsepsi dalam rangka menjawab masalah-masalah lingkungan, membina kelestarian lingkungan dan untuk menunjang berbagai kegiatan pembangunan sektoral seperti pertanian dan pariwisata". Gubernur KDH Dati I Bali Prof. Dr. Ida Bagus Mantra mengatakan hal itu kepada dua penulis Indonesia Membangun Dwi Ratnaningrum dan Nurlian Berty Bukit di Denpasar sewaktu mengunjungi daerah tersebut.
Selanjutnya ia menegaskan bahwa Bali Menuju Pulau Taman bukan sekedar semboyan dan keinginan semata namun lebih merupakan suatu gagasan yang disepakati sebagai suatu cara untuk menata wajah pulau Bali menjadi suatu wilayah yang indah dan lestari sepanjang masa, serta mampu memberikan ketentraman jasmani dan rohani bagi segenap penghuninya, sekaligus membuat pendatang jadi ingin lama tinggal di Pulau Bali.

Gagasan Bali Menuju Pulau Taman pada mulanya dicetuskan dalam Lokakarya mengenai Pembangunan Hutan dalam rangka menunjang Kepariwisataan dan Lingkungan Hidup di Bali yang diselenggarakan di Kuta-Denpasar pada tahun 1976. Lokakarya ini diselenggarakan atas dasar pemikiran dimana kerusakan Lingkungan semakin gawat dalam waktu 10 - 20 tahun terakhir, yang erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Lokakarya dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 1977, yang menyatakan bahwa kegiatan mengembangkan Bali Menuju Pulau Taman tetap mencerminkan kehidupan dinamika Bali yang khas, yang didukung oleh beberapa hal yaitu : a) kehidupan agama, budaya dan tradisi, b) kekeluargaan melalui kegotongroyongan, c) demokrasi dengan sejauh-jauhnya menempuh musyawarah dan mufakat, d) keadilan dalam menikmati hasil pembangunan sesuai dengan dharma baktinya dan e) keseimbangan dalam material dan spiritual.

Tahun 1978 diadakan lagi Lokakarya dalam rangka penyusunan Repelita III Daerah Propinsi Dati I Bali, dalam kesempatan tersebut disarankan perlunya penjajagan dengan mengkaitkan setiap kegiatan pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan budaya dengan ide Bali Menuju Pulau Taman.
Ternyata penjajagan dimaksud dilaksanakan antara lain di tahun 1982 mengenai penelitian tentang aspek-aspek landsekap dalam rangka penyusunan program Bali Menuju Pulau Taman. Tahun 1984 dilaksanakan penelitian tentang aspek-aspek sosial budaya dalam rangka penyusunan program yang sama.

Ditinjau dari segi kehidupan sosial budaya masyarakat Bali mempunyai sejumlah potensi besar dalam mewujudkan gagasan Bali sebagai Pulau Taman.
Dari aspek kepribadian masyarakat Bali memiliki sikap positif untuk melestarikan lingkungan, upacara-upacara, kerjasama, lembaga subak, bangunan tradisional Bali dan benda-benda suci. Potensinya dari aspek sosial budaya terlihat dalam hal pengetahuan mereka tentang lembaga subak dan sekaa, sistem gotong royong dalam pertanian, aturan-aturan hukum dan dalam usaha mempertahankan nilai-nilai budaya. Sedang-

"BALI Striving to Become a Park Island" is essentially a dynamic concept based upon ecology. In the concept which materializes into a process, the position of man plays a vital role, in the sense of man's interaction with his fellowmen and man's interaction with life's environment.

In a global sense, the industrially advanced nations and the developing nations are facing problems of life's environment, although they are actually different. In the industrially advanced countries, most environmental problems are the impact of economic and technological progress, while those facing the developing countries are caused by poverty which is forcing the people to destroy their natural environment or by a combination of the two.

The problems of life's environment in Indonesia began to be discussed in the nineteen seventies. There are three reasons why Indonesia feels the urgency to solve these environmental problems : the conciousness that the country already has a serious problem of life's environment; the need to bequeath to the forthcoming generations natural resources which can be processed continually in a long-term development program; and an ideal reason, that is, a desire to develop the country.

"In microscale, which is applicable to the island of Bali, the concept 'Bali Striving to Become a Park Island' has been developed to answer the problems of environment, to conserve life's environment and to support the different sectors of development, such as, agriculture and tourism."
*The Governor of Bali, **Prof Dr Ida Bagus Mantra** mentioned it to two authors of "Indonesia is Building", namely, Dwi Ratnaningrum and Nurlian Berty Bukit, in Denpasar when they were visiting the town.*

The Governor emphasized that "Bali Striving to Become a Park Island" is not a mere slogan and a wishful thinking, but it is an accord regarded as a means to facelift Bali into a beautiful district conserved to time eternal, capable of bringing physical and spiritual comfort to its inhabitants, and making visitors want to stay longer in Bali.

The "Bali Striving to Become a Park Island" idea first emerged at a workshop on Forest Development in the Framework to Support Tourism and Life's Environment in Bali which was held at Kuta-Denpasar in 1976. The workshop was organized on the basis that the damage of environment has become more serious in the last 10 to 20 years due to the high rate of growth in population. The workshop was followed by a panel discussion in Bogor in 1977 which concluded that the activities to develop Bali into a Paradise Island would reflect the specific dynamism of life in Bali, which is attributable to a number of factors : a) religious life, culture and tradition, b) family unity through the spirit of mutual cooperation, c) democracy through consultation and consensus, d) justice in the enjoyment of the results of development by dedicated service and e) balance between material and spiritual matters.

In 1978, another workshop was held in the framework to prepare the Third Five Year Plan of Bali, during which the importance to explore the relationship between the physical development - whether economic or social cultural and the concept of "Bali Striving to Become a Park Island" was emphasized. Such exploration was carried out in 1982 by studying the different aspects of landscaping in the course of compiling a program for the above mentioned concept. In 1984, a study was made regarding social-cultural aspects in the framework of making the same program.

In view of the social-cultural life of the community, Bali has indeed the great potential to realize the concept of "Bali Striving to Become a Park Island".

*Considering the personality of the Balinese community, they have a positive attitude toward conserving their environment, ceremony, cooperation, water control system (subak), traditional structure and holy things in Bali. Their social-cultural potential is obvious from their knowledge of such institutions like the **subak** and **sekaa**, their mutual cooperation in agriculture, laws and regulations in an effort to retain their cultural values and to overcome obstacles to maintain norms in the community procedures.*

Other sources which are rich in such ideas are the performance of religious ceremonies in the relations between man and God, between man and nature, between man an his fellowman, the religious offering, the conservation of sacral art, etc. In addition, the knowledge of the community of animal husbandry for the Panca Yadnya ceremony can contribute toward the further development of Bali.

*From the standpoint of culture, the Balinese community shows their potential with regard to work ethos, knowledge of **padewasan**, law, sacredness and village cleanliness.*

kan hambatannya dalam hal mempertahankan norma masyarakat dalam pengaturan tata tertib masyarakat.

Dalam pelaksanaan upacara keagamaan yang berkaitan antara hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, pengadaan sesajen untuk upacara, kelestarian kesenian sakral dan lain sebagainya merupakan sumber yang kaya bagi gagasan tersebut. Di samping itu juga dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang hewan/ternak untuk upacara Panca Yadnya dapat pula mendorong semangat pembangunan lingkungan di Bali. Dari segi aspek budaya, masyarakat Bali memperlihatkan beberapa potensi yang meliputi etos kerja, pengetahuan tentang padewasan, hukum, nilai kesucian dan kebersihan desa.

Program Bali Menuju Pulau Taman kini sudah merupakan program yang berusaha melestarikan lingkungan hidup di propinsi Dati I Bali. "Karena dengan keadaan lingkungan yang demikian itulah maka umat manusia yang sekarang maupun generasi-generasi seterusnya akan dapat melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-citanya dengan baik dan sempurna", demikian antara lain disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Bali 1984/1985 - 1988/1989.

Di bidang ekonomi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali menjelaskan bahwa Bali memiliki tiga aspek penting yang mendapat penekanan karena potensinya yang juga sangat besar yakni pertanian, pariwisata dan industri.

Ketiga sektor yang merupakan potensi daerah Bali ini juga merupakan kegiatan pokok pembangunan di empat Wilayah Pembangunan di Bali (wilayah Pembangunan Bali Timur, Wilayah Pembangunan Bali Tengah, Wilayah Pembangunan Bali Barat dan Wilayah Pembangunan Bali Utara).

Ketiga sektor (potensi pembangunan daerah Bali) yang termasuk dalam bidang ekonomi ini memang pada prinsipnya juga berkaitan erat dengan gagasan Bali Menuju Pulau Taman. Hal itu tampak jelas ketika penulis mengadakan perjalanan untuk keperluan liputan ini ke berbagai daerah di Bali.

1) Wilayah Pembangunan Bali Timur

Wilayah ini meliputi kabupaten Dati II Karangasem, Bangli dan Klungkung, dengan pusat pertumbuhannya di Klungkung. Dalam bidang pertanian, semua komoditi di wilayah ini seperti kacang-kacangan, salak, wani dan nenas secara ekonomis dapat dikembangkan dan pemasarannyapun lancar. Namun semua komoditi masih di bawah produksi rata-rata tingkat Propinsi Bali, sehingga perlu diadakan penyuluhan yang lebih intensif khususnya untuk komoditi kacang-kacangan, salak dan nenas, karena komoditi tersebut merupakan komoditi yang potensial di wilayah ini.

Untuk komoditi wani, petani di wilayah ini hanya menanaminya sekitar 20,4% dari seluruh areal lahan yang dimiliki, hal ini disebabkan karena wani bukanlah merupakan komoditi yang potensial.

Pada umumnya para petani di wilayah ini menjual produksinya kepada pedagang pengecer dan untuk kacang-kacangan 100 persen dari petani menjualnya kepada tengkulak. Dalam hal ini peranan KUD belum tampak. Dan untuk produksi nenas ternyata hanya 5,9% dari petani yang mengijonkan. Kesemuanya ini menampakkan bahwa pada umumnya para petani sangat aktif untuk memasarkan hasil produksinya sendiri.

Dari segi sikap, ternyata para petani berpendapat bahwa tanaman salak dan nenas dianggap sebagai komoditi yang potensial, sedangkan kacang-kacangan dan wani dianggap sebagai komoditi yang berpotensi tetap mengandung resiko atau komoditi yang masih meragukan.

Dalam bidang perikanan dan peternakan di wilayah pembangunan Bali Timur dimaksudkn rumput laut, sarang burung, ternak babi, kambing dan sapi. Secara ekonomis usaha bidang perikanan dan peternakan ini potensial untuk dikembangkan, kecuali untuk ternak babi.

Tanggapan petani terhadap usaha rumput laut dan ternak kambing termasuk potensial; sarang burung merupakan ternak yang dianggap kurang effisien dilihat pada aspek pemanfaatan waktu, pemenuhan keperluan rumah tangga dan prospek pemasarannya juga masih meragukan, karena pembeli sarang burung ini terbatas pada golongan-golongan tertentu saja.

Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam ternak babi yang dihadapi terutama pada aspek penyediaan bibit dan pemenuhan keperluan rumah tangga; demikian juga halnya dengan usaha pemeliharaan sapi.

Bidang industri di wilayah ini yang potensial adalah industri pembuatan garam, yang ditinjau dari segi ekonomi cukup menarik karena pemasarannyapun lancar. Disamping industri pembuatan garam juga bidang kerajinan rakyat sangat potensial untuk dikembangkan. Berbeda dengan industri genteng yang perlu mendapatkan perhatian jika dilihat dari variabel lokasi usaha, persediaan bahan baku yang terbatas, prospek produksi dan prospek pemasaranya. Di daerah ini juga banyak tum-

The "Bali Striving to Become a Park Island" concept has become a program designed to conserve life's environment in the Province of Bali. "Only under such living environment can the present mankind and the forthcoming generations carry out development to realize their ideals properly and completely", it was stated in the Basic Design of the Bali Development Plan for 1984/85 - 1988/89.

In the field of economy, the Governor of Bali said that the province has three important sectors which have received great attention due to their great potential, namely, agriculture, tourism and industry. These three sectors which constitute the big potential of Bali are also the centre of development activities in Bali's four development areas (East Bali Development Area, Central Bali Development Area, West Bali Development Area, and North Bali Development Area). The three sectors (which are the potential development in Bali) which are related to the island's economy are basically linked to the "Bali Striving to Become a Park Island" concept. This is clearly evident when the author made a tour of the island of Bali for this purpose.

1) East Bali Development Area

*This area covers the Kabupaten of Karangasem, Bangli and Klungkung, with Klungkung as its growth centre. In the field of agriculture, commodities like legume, **salak, wani** and pineapple can be grown luxuriantly in the area and they are marketable. However, their production level is still below that of the entire province, indicating that more intensive information is required, particularly for the cultivation of legume, salak, and pineapple, which are the area's potential commodities.*

The farmers in this area cultivate about 20.4% of their plot of land with wani, considering that it is not a potential commodity.

In general, the farmers in this area sell their products to the retailers, except legume which they sell entirely to the brokers. The role of rural cooperative here is still insignificant. About 5.9% of the farmers mortgage their pineapple production. This indicates that in general the farmers very actively market their own products. They regard salak and pineapple as potential commodities, while legume and wani, although potential, are commodities that contain some risk.

Fishery and animal husbandry in the East Bali Development Area are producing see weeds, bird nests, pigs, sheep, and cattle. Economically, fishery and animal husbandry are capable of being expanded, except for the breeding of pigs.

The farmers consider sea weed and sheep breeding as potential sources of income, while bird nest business is considered inefficient in terms of the use of time, fulfillment of household needs and its marketing prospect, since the buyers of bird nests are restricted to certain groups of people.

The problems of pig breeding lie in the getting stockers and in meeting the household needs. The same problems apply to cattle breeding.

A potential industry in this area is the manufacture of salt, which is lucrative since it is marketable. Besides salt manufacturing industry, craftsmanship is another area which can be developed. It is unlike the roof tile manufacturing industry which requires much attention in view of its location, limited supply of raw material, production and marketing prospects. In this area, there are a number of silver wares industry, endek and traditional textile mills. Although socially these industries are still facing problems, they are quite positive in terms of production and economic value. In terms of employment, East Bali Development Area has a high rate of absorption for manpower by means of its handicraft, endek and painting industries.

In the field of tourism, the area's hotel and restaurant industry in particular can be further developed when viewed from its economic potential, especially in the Candidasa district. Since it is a new tourist area, the number of tourists who come to East Bali Development Area is relatively smaller than that in other areas. However, the rate of occupancy at the initial stage indicates that this area can be expanded further.

2) Central Bali Development Area

This area covers the Kabupaten of Badung and Gianyar, with Denpasar as its growth centre. In accordance with the suggestion of the Governor, there are three potential sectors in this area, namely, agriculture, tourism, and industry.

*In the agriculture and food crop subsectors, this area produces a number of commodities like orange, rice, lychee, silik, salak, and mango. Economically, these commodities can be expanded in terms of their production and marketing. Regarding the production of orange, salak and mango, it is lower than the average output of the entire province. Perhaps it is due to the fact that orange and salak are grown only recently in this area. Thus, the growers have not gained ample experience in growing and developing them. **Salak,** in particular, has been cultivated only recently in Kecamatan Payangan and Kecamatan Gianyar, while orange was introduced not long ago to the Bukit distrik, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.*

buh usaha kerajinan perak, endek dan pertenunan tradisional. Meskipun dari segi sosial usaha ini juga masih mengandung kendala, tetapi dari segi produksi dan nilai ekonomis sangat positif. Jika dilihat dari segi tenaga kerjanyapun kerajinan rakyat di Wilayah Pembangunan Bali Timur ini mempunyai daya serap yang tinggi seperti misalnya dalam usaha kerajinan gong dan endek serta lukisan.

Dalam bidang pariwisata khususnya bidang perhotelan dan restoran yang dipandang dari sudut ekonomi di wilayah ini dapat dikembangkan, terutama di wilayah Candidasa.

Karena masih merupakan wilayah baru, maka dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya ternyata jumlah wisatawan yang datang di Wilayah Pembangunan Bali Timur rata-rata masih lebih rendah. Namun demikian tingkat okupansi yang diperoleh pada awal permulaan kegiatan memberikan petunjuk bahwa wilayah ini bisa dikembangkan.

2) Wilayah Pembangunan Bali Tengah

Wilayah ini meliputi Kabupaten Dati II Badung dan Gianyar, dengan pusat pertumbuhannya di Denpasar.

Sesuai dengan saran Gubernur, ada tiga potensi di wilayah ini yang menonjol yakni sektor pertanian, pariwisata dan sektor industri.

Pada sub sektor pertanian dan tanaman pangan, nampak pula beberapa komoditi seperti jeruk, padi, leci, silik, salak dan manggis. Secara ekonomis semua jenis komoditi ini dapat dikembangkan baik produksi maupun pemasarannya. Mengenai produksinya jeruk, salak dan manggis nampak masih dibawah rata-rata tingkat produksi di Propinsi Bali. Kondisi ini dimungkinkan karena komoditi jeruk dan salak merupakan suatu komoditi yang baru dikembangkan. Dengan demikian para petani belum banyak pengalaman untuk bertanam dan mengembangkan komoditi tersebut. Salak khususnya, mulai dikembangkan di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Payangan dan Kecamatan Gianyar. Sedangkan jeruk mulai dikembangkan di wilayah Bukit Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

Rendahnya produksi komoditi manggis di wilayah ini dimungkinkan karena secara intensif komoditi manggis belum dikembangkan. Untuk meningkatkan produksi perlu adanya pembinaan dan penyuluhan dari pihak yang berkompeten. Khusus untuk jenis tanaman silik, nampaknya masih muncul beberapa tanggapan negatif dari para petani setempat. Terutama terhadap cara pemeliharaan, pemanfaatan waktu, pemakaian tenaga kerja, prospek pemasaran serta terhadap produksi yang dicapainya. Hal ini dapat dimaklumi, karena pengembangan tanaman silik masih belum dilaksanakan secara intensif dan tampaknya pemerintahpun masih perlu memberikan perhatian terhadap komoditi ini secara khusus.

Pembinaan terhadap petani tidak dilakukan dalam segi produksinya saja, namun perlu juga dilaksanakan terhadap sistem pemasarannya. Dari hasil liputan dapat diketahui, umumnya para petani masih memasarkan hasil produksinya melalui pedagang perantara. Dengan demikian pembinaan terhadap para petani agar terangsang untuk memanfaatkan Koperasi Unit Desa setempat; walaupun memang nampak diantara para petani itu ada juga yang memasarkan produksinya melalui lembaga KUD.

Dari segi sikap petani ternyata komoditi padi, leci, salak dan manggis dianggap sebagai komoditi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam hal komoditi manggis, petani di wilayah ini masih melihat prospek pemasaran yang memprihatinkan, kondisi demikian mengandung arti bahwa kepada para petani tersebut perlu diberikan informasi mengenai potensi pasar.

Pada sektor pariwisata, hotel yang ditinjau dari segi tenaga kerja masih tergolong sedang dan kecil. Meskipun demikian dari aspek ekonomi kegiatan di bidang ini memberikan prospek yang cukup baik, karena memiliki okupansi sebesar 46,9%. Hal ini juga didukung oleh aspek sosial yakni dengan adanya tanggapan positif dari masyarakat setempat terhadap usaha ini.

Pendapatan yang diterima dari bidang ini secara absolut dirasakan masih kurang, karena dengan pendapatan sebesar Rp 1,3 juta pengeluarannya mencapai Rp 900 ribu setiap bulan; berarti keuntungan bersih yang diperolehnya hanya sekitar Rp 400 ribu sebulan. Ditinjau dari aspek sosial pendapatan ini perlu ditingkatkan, antara lain dengan cara mengembangkan kegiatan tersebut.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain pemasaran yang kurang intensif serta pengelolaan hotel yang kurang profesional. Apabila kegiatan ini diintensifkan maka produktivitas yang dapat diukur dengan tingkat okupansi dapat lebih ditingkatkan lagi.

Khususnya untuk sektor industri, di wilayah Pembangunan Bali Tengah berkembang industri pengolahan bahan makanan dan industri kerajinan rakyat. Bidang pengolahan bahan makanan yang dimaksud adalah usaha pembuatan jajan dan sosis. Secara ekonomis usaha

The low production of mangosteen in this area is due to the lack of intensified cultivation of this fruit tree. To increase its output, promotion and information have to be given by competent parties. The cultivation of silik, in particular, is viewed negatively by some local farmers on account of the care, time spent, and man-hour it takes, as well as its marketing prospect and production level. This is understandable, seeing that the cultivation of silik has not been intensified and it seems that the Government will have to give more attention to this commodity, in a special way.

Promotion which is given to the farmers is limited to their production only. However, it is necessary to promote their ability to market their products too. It has been detected from field surveys that in general the growers still market their products through intermediateries. Therefore, promotion should be directed to urge to the growers to use the rural cooperatives, although some of them do market their products through such rural cooperative.

From the growers point of view, rice, lychee, salak, and mangosteen are potential commodities that should be cultivated further. Some growers look upon mangosteen with concern because of its marketing prospect, which means that they need to be given information concerning market potential.

Two industries which have grown well in the Central Bali Development Area are food manufacturing and smallholder's handicraft. The food manufacturing industry referred to produces sweets and sausages. Economically such industry has good potential. Its marketing is very smooth and its is facing little competition, particularly from modern baker's bread.

In general, the smallholder's handicraft industry in the Central Bali Development Area produces fan, sculpture, concrete handicraft, basketry, dancer's apparel, gold handicraft, ***endek, keris****, canoe, iron handicraft, painting and umbrella. From the economic standpoint, it is worthwhile to develop this industry, in addition to its social aspect. All these commodities are quite potential, particularly when viewed from the utilization of time, employment and the appropriateness of its location. Viewed from the marketing variability, some commodities are rather hard to sell, because of competition and the emergence of substitutes for canoe, concrete brick, and painting.*

3) West Bali Development Area

This area includes the Kabupaten of Tabanan and Kabupaten Jembrana. Some of the commodities produced in the West Bali Development Area are coffee, clove, vanilla, coconut, vegetable (cabbage, carrot, and potato). However, the output level of coconut, coffee, carrot, potato, and rice is below the average production level of entire province of Bali.

When compared with the acreage of land owned by the farmers, only a small portion - 26.9% of the entire tillage - is used for the cultivation of vanilla, because of its difficult cultivation compared to that of other plants. The farmers in this area generally prefer faster cash payment. This is evident from the selling system they used : they sell the produce before harvesting, particularly coconut, cabbage, carrot, and rice. This indicates the urgency to expand the role of rural cooperative, to improve its management and funding, and on the part of farmers, the need to correct their attitude.

Fishery in this are in terms of freshwater shrimp or deepsea fishery, when considered economically, is capable of further expansion, particularly the freshwater shrimp breeding.

Regarding the smallholder's handicraft industry in the West Bali Development Area, it can be said that it has flourished well. This area is well known for its ***cagcag*** *fabric and ceramic.*

From the standpoint of employment, fish canning industry employs the largest number of workers, followed by the ceramic and coffee milling industries. However the ceramic industry here proves to be a side line business which, socially, cannot provide a secure future, although it is economically considered profitable.

Viewed from their marketing, the smallholder's handicraft in this area is saleable, especially because a large number of foreign tourists like the specific handicraft of this area.

The field of tourism which is being developed here is ***mekepung.***

Generally speaking, ventures which are operating in the field of agriculture, food crop, and estate, in the field of fishery, industry, and smallholder's handicraft, as well as tourism in the West Bali development Area continue to be expanded.

In addition, more promotion is needed for some food crops and estate in order to increase their production, and for some manufacturing industries, especially the ceramic and brick making industries in order to improve their marketing capability, and for the rural cooperative to enlarge its role in the local economy. Promotion is also needed for mekepung in order to support the tourism industry, so that its economic and social benefit can be enjoyed. Apart from the above improvement, in connection with the "Bali Striving to Become a Park Island" concept, it is necessary for the Government to provide some additional facilities.

tersebut memang cukup punya potensi yang baik. Dari segi pemasarannya dirasakan sangat lancar dan halnya sedikit saingan terutama roti buatan pabrik.

Umumnya industri kerajinan rakyat yang terdapat di wilayah Pembangunan Bali Tengah; kipas, patung kayu, kerajinan beton, anyaman bambu, pakaian penari, kerajinan emas, endek, keris, jukung, pandai besi, lukisan dan payung, ditinjau dari aspek ekonomi ternyata dapat dikatakan potensial untuk dikembangkan. Hal ini didukung pula oleh aspek sosial. Semua komoditi cukup berpotensi terutama ditinjau dari variabel pemanfaatan waktu, penggunaan tenaga kerja dan ketepatan lokasi industri. Dilihat dari variabel pemasaran, terdapat beberapa komoditi yang kurang lancar, karena munculnya saingan dan adanya komoditi substitusi seperti jukung, batako dan lukisan.

3) Wilayah Pembangunan Bali Barat

Yang termasuk wilayah ini adalah Kabupaten Dati II Tabanan dan Kabupaten Dati II Jembrana. Umumnya komoditi yang terdapat di wilayah Pembangunan Bali Barat ialah Kopi, cengkeh, panili, kelapa, sayur-mayur (kubis, wortel dan kentang). Meskipun demikian komoditi seperti kelapa, kopi, wortel, kentang dan padi produksinya masih di bawah rata-rata produksi tingkat Propinsi Bali.

Apabila dilihat dari prosentase luas lahan yang dimiliki petani setempat, ternyata tanaman panili paling sedikit dikembangkan oleh petani di wilayah ini, yakni hanya sekitar 26,9% dari luas lahan. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan tanaman panili agak lebih sulit dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang lainnya.

Pada umumnya para petani di wilayah ini ingin mendapatkan uang kontan dengan lebih cepat. Hal ini terbukti dengan adanya kenyataan bahwa mereka melaksanakan pemasaran dengan sistem tebasan, khususnya untuk komoditi kelapa, kubis, wortel dan padi.

Dengan demikian berarti bahwa peranan KUD perlu ditingkatkan lagi. Dengan sendirinya kelemahan dalam sistem manajemen dan permodalan KUD dan juga para petani pembenahan yang intensif.

Usaha perikanan di wilayah ini baik tambak udang maupun perikanan laut, ditinjau dari ekonomis cukup potensial untuk berkembang, misalnya tambak udang.

Mengenai usaha kerajinan rakyat yang ada di wilayah Pembangunan Bali Barat dapat dikatakan sudah cukup berkembang. Daerah ini sangat terkenal karena tenun cagcag dan keramiknya.

Dari segi tenaga kerja, maka industri pengalengan ikan dapat menyerap tenaga kerja yang paling banyak, kemudian keramik dan industri tepung kopi.

Tetapi ternyata industri keramik masih tetap merupakan usaha sambilan, yang berarti menurut aspek sosialnya usaha sambilan ini kurang menjamin masa depan, walaupun secara ekonomis dianggap menguntungkan.

Apabila ditinjau dari segi pemasaran komoditi kerajinan rakyat di wilayah ini cukup lancar, apalagi banyak turis asing yang menyukai hasil kerajinan yang bersifat khas dari daerah ini.

Bidang pariwisata yang sedang dikembangkan di sini ialah "makepung".

Secara umum usaha-usaha yang telah dilakukan dalam bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan, bidang perikanan, bidang industri dan kerajinan rakyat serta bidang pariwisata di Wilayah Pembangunan Bali Barat terus ditingkatkan.

Disamping itu juga diperlukan adanya peningkatan pembinaan terhadap beberapa komoditi tanaman pangan dan perkebunan dalam rangka peningkatan hasil produksi; kemudian pembinaan beberapa bidang industri khususnya keramik dan batu batá sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemasaran terutama dalam meningkatkan peranan Koperasi Unit Desanya.

Pembinaan terhadap kegiatan mekepung dalam rangka menunjang pariwisata perlu ditingkatkan juga, sehingga dapat dirasakan menguntungkan dari segi ekonomi maupun segi sosial. Selain perlunya peningkatan dalam hal-hal tersebut, maka dalam kaitannya dengan gagasan Bali Menuju Pulau Taman, juga hendaknya Pemerintah dapat membantu dalam hal pengadaan fasilitas.

4) Wilayah Pembangunan Bali Utara

Wilayah Pembangunan Bali Utara ini hanya meliputi Daerah Tingkat II Buleleng yang pusat pertumbuhannya di Singaraja. Semua komoditi dalam bidang pertanian tanaman pangan yang ada di wilayah ini seperti : jeruk, anggur, cengkeh, kopi, tembakau, mangga, durian dan rambutan, selama ini sangat terkenal dan merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk.

Masalah yang dihadapi oleh para petani tersebut menyangkut tingkat produksi yang belum maksimal. Produksi jeruk dan anggur memang

4) North Bali Development Area

The North Bali Development Area consists of only the Kabupaten of Buleleng, with Singaraja as its growth centre. The food crops originating from this area like orange, grape, clove, coffee, tobacco, mango, durian and rambutan, have enjoyed a good reputation and constitute the main source of income for the local inhabitants.

The problem facing the farmers is how to raise the production level to the maximum. The output of orange and grape is above the average production level of the Province of Bali, but the output level of clove, coffee, tobacco, mango and durian is lower than the average production level of the island. Clove is a very sensitive product and its output is unstable if it is not cultivated intensively. Other fruits like mango, durian, and rambutan, are harvested annually and when they are in season, their prices usually fall, since they are seasonal fruits.

The type of manufacturing industry set up in the North Bali Development Area is the agricultural product processing industry. Physically, this area is very suitable for the development of grape must industry, considering the suitability of its location and the availability of raw material. Thus, economically, the grape must industry has a great potential for development in the North Bali Development Area. However, there are problems that demand much attention, among others, a problem which arises from its unintensified processing, since most of them employ members of their family and the marketing has not been smooth. Another problem is the attitude of the farmers who doubt the profitability of making the grape must industry as their main source of income, seeing that it cannot meet their household needs yet.

In view of the above problems, in order to develop and improve the grape must industry in the area, a number of things has to be observed :

- *the use of raw material has to be increased, thus pushing up the level of its output.*
- *since it is difficult to market the product, the enterpreneurs in this field have to be assisted in distributing their products. In this regard the Goverment's role, especially in marketing, is very significant. Since the North Bali Development Area already has a number of groups of grape growers, they can be asked to assist in the marketing of product of the grape must industry*
- *there is a need to disseminate information to the grape must enterpreneurs concerning the use of raw material, processing and marketing.*

In the North Bali Development Area, the tourism sector has not been handled professionally. This is obvious from the management of the hotel which is done by the owner himself. Economically, the hotel business in this area is bringing an adequate income to its owner - an average of Rp1,030,600 a month. However, it is regarded rather low by the hotel owner, because the revenue amounts only to twice the total expenditure they have to pay.

The number of employees average 3 to 13 persons, which is considered standard. But the local community looks upon this business as having a good potential from the standpoint of employment.

Other problems that demand attention in this sector are, among others, the lack of intensive marketing effort.

In connection with the "Bali Striving to Become a Park Island" concept, the different ventures in the production of food crops and estate, in farm product processing industry and tourism in the area must continue to be expanded, since they are potential for further development when viewed from the economic standpoint.

The promotion activity which has to be done in this area include the following :

- *Promotion is needed for the higher production of some food crops and estate like clove, coffee, tobacco, mango and durian. It is likewise needed for the cultivation of orange to eliminate any doubt the growers may still have of the good prospect of orange cultivation.*
- *Promotion is needed for the grape must industry since it is economically potential for further expansion. Promotion should be directed mainly for its more intensive processing and its marketing, so that there should be no doubt about its outcome.*
- *In the field of tourism, promotion should be directed toward a more professional management and a more intensive marketing*
- *The role of rural cooperative should be enlarged in order to handle the farmers' production, thus increasing their income.*

Considering the linkage of economic development with the "Bali Striving to Become a Park Island" concept, effort should be made to tie up these ventures with the community's participation. Their participation, for example, can be encouraged by aiming at the welfare of the whole Balinese people, thus making it a project for the entire Balinese community. Thus, it is necessary to cheer the whole community to participate, since the real objective of development of the Island of Bali is the welfare of the Balinese community themselves.

berada di atas rata-rata produksi tingkat Propinsi Bali, tapi produksi cengkeh, kopi, tembakau, mangga dan durian ternyata lebih rendah dari rata-rata produksi daerah cengkeh adalah merupakan suatu komoditi yang sangat peka dan hasilnya sangat berfluktuasi kalau tidak dipelihara dengan intensif.

Sedangkan dalam hal komoditi mangga dan durian serta rambutan, produksinya hanya setahun sekali dan pada saat berproduksi pada umumnya harganya menurun, karena komoditi ini merupakan tanaman yang produksinya bersifat musiman.

Bidang industri yang terdapat di Wilayah Pembangunan Bali Utara adalah industri pengolahan hasil pertanian. Dan bila dilihat secara fisik, maka di wilayah ini sangat cocok untuk mengembangkan usaha atau industri sari buah anggur, karena selain lokasinya cocok, juga tersedianya bahan baku yang menunjang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara ekonomi industri sari buah anggur sangat potensial untuk tetap dikembangkan di Wilayah Pembangunan Bali Utara.
Walaupun demikian masih ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian antara lain dalam segi pengolahannya yang belum intensif, sehingga pada umumnya mereka menggunakan tenaga kerja keluarga dan pemasarannyapun agak kurang lancar. Hal ini diperkuat oleh tanggapan para petani di wilayah tersebut yang masih meragukan usaha industri sari buah anggur sebagai pekerjaan utama, karena belum dapatnya memenuhi kebutuhan rumah tangga dari usaha ini.

Mengingat adanya beberapa masalah tersebut maka untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan industri sari buah anggur di wilayah ini, menurut pengamatan beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah :

- pemanfaatan bahan baku perlu ditingkatkan lagi sehingga terjadi pula peningkatan produksi;
- karena adanya kesulitan dalam pemasaran hasil, maka para pengusaha di bidang ini perlu dibantu dalam hal penyebarluasan produk. Dalam hal ini peranan Pemerintah sangat berarti, terutama dalam masalah pemasaran.
  Sebagaimana diketahui bahwa di Wilayah Pembangunan Bali Utara ini sudah terbentuk kelompok-kelompok petani anggur, dimana hal ini dapat membantu atau dapat dipakai sebagai batu loncatan bagi penyebarluasan pemasaran produk industri sari buah anggur;
- perlu adanya penyuluhan terhadap pengusaha sari buah anggur, terutama dalam hal pemanfaatan bahan baku, produksi (pengolahan) dan pemasarannya.

Di Wilayah Pembangunan Bali Utara nampaknya sektor pariwisata belum memperoleh penananganan secara profesional. Hal ini dapat terlihat dari segi manajemen atau pengelolaan yang dilakukan sendiri oleh pemilik hotel. Secara ekonomis usaha di bidang perhotelan di wilayah ini memberikan pendapatan rata-rata cukup bagi pemiliknya, dimana rata-rata pendapatan bersih adalah sekitar Rp 1.030.600,- per bulan. Penghasilan tersebut dipandang masih rendah oleh pemilik hotel, karena penerimaan yang diperoleh hampir dua kali lipat biaya yang dikeluarkan.

Tenaga kerja yang digunakan berkisar rata-rata antara 3 sampai 13 orang, kondisi seperti ini termasuk dalam kategori sedang. Namun masyarakat setempat memandang usaha ini mengandung potensi dari sudut tenaga kerja.

To encourage the community's participation is to arouse their spirit of self-help which will move them to take an active part in various ventures and which will secure the conservation of Bali's nature and culture, thus creating a sense of belonging and responsibility in developing the Island of Bali by utilizing manpower, natural resources, infrastructure and facility. The growth of the community's participation depends on their attitude and the economical benefit which they can enjoy themselves.

Beberapa masalah lain yang perlu mendapat perhatian di bidang ini antara lain pemasaran yang kurang intensif.

Dalam kaitannya dengan gagasan Bali Menuju Pulau Taman, maka hendaknya berbagai usaha yang dilakukan dalam bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan, bidang industri pengolahan hasil pertanian serta bidang pariwisata di wilayah Pembangunan Bali Utara ini dapat terus ditingkatkan, karena usaha-usaha tersebut potensial untuk dikembangkan jika dipandang dari sudut ekonomi.

Dengan demikian kegiatan-kegiatan pembinaan yang perlu terus digalakkan di wilayah ini antara lain :

- terhadap beberapa komoditi tanaman pangan dan perkebunan seperti cengkeh, kopi, tembakau, mangga dan durian dalam rangka peningkatan produksi. Juga terhadap komoditi jeruk, untuk menghilangkan sikap ragu-ragu dari pada petani jeruk sehingga prospek masa depan jeruk kembali cerah,
- terhadap usaha bidang industri sari buah anggur, karena dari segi ekonomis potensial untuk dikembangkan. Pembinaannya diarahkan terutama dalam rangka pengolahan yang lebih intensif serta dalam hal pemasarannya, sehingga hasil yang dicapai tidak meragukan,
- dalam bidang perhotelan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan yang lebih profesional serta penanganan pemasaran yang lebih intensif,
- peranan KUD terus ditingkatkan dalam rangka menangani produksi petani, sehingga pendapatan petani dapat lebih ditingkatkan.

Sejalan dengan pengkaitan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi dengan gagasan Bali Menuju Pulau Taman, diusahakan menghubungkan usaha-usaha tersebut dengan partisipasi masyarakat. Usaha ini misalnya dapat terwujud dengan mencapai kesejahteraan masyarakat Bali seutuhnya, dan hendaknya menjadi kegiatan masyarakat Bali sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya dorongan kepada segenap masyarakat untuk ikut serta, karena pada hahekatnya tujuan pembangunan Pulau Bali adalah untuk masyarakat Bali juga.
Menggerakkan partisipasi masyarakat bermaksud mengusahakan peningkatan tumbuhnya swadaya masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai usaha yang dapat menjamin kelestarian alam dan budaya Bali, sehingga timbul rasa turut memiliki dan bertanggung jawab dalam pembangunan pulau Bali yang bermodal dasar manusia, sumber daya alam, prasarana dan sarana. Dan tumbuhnya partisipasi masyarakat tergantung dari sikap masyarakat serta keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh masyarakat itu sendiri.

INDONESIA
ADALAH UNTAIAN MUTIARA
DI KHATULISTIWA
KEINDAHAN ALAMNYA
MODAL UTAMA PENGEMBANGAN
PARIWISATA

PEMBANGUNAN NASIONAL

Menciptakan
Hari-hari yang Penuh
Kepastian!



Gedung baru Bali Post berlantai tiga, Jl Kepundan 67 A Denpasar



Bali Post

"Bali Post" Membangun dan Dibangun

MENGENANG tahun 1948 berarti mengenang riwayat perjuangan. Pada saat bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan itulah, "Suara Indonesia" yang sejak tahun 1971 dikenal sebagai "Bali Post" lahir. Tepatnya 16 Agustus 1948. Tak pelak lagi kelahiran koran ini memang bermotivasi dan mengembangkan misi perjuangan. Muncul pertama dalam format folio, dicetak "mesin"duplikator yang tidak baru. Satu-satunya modal yang mendorongnya adalah kemauan dan tekad.



Bali Post terbit dalam edisi Harian, Mingguan dan Pedesaan. Tampak dalam gambar "Bali Post Pedesaan Edisi Jerman Barat" (kiri bawah) sebagai profil hasil studi mahasiswa negara tersebut di Indonesia tahun 1985

Motivasi dan misi perjuangan ini tetap diteruskan pada zaman pembangunan ini. Seiring dengan gerak pembangunan dari Pelita ke Pelita, "Bali Post' senantiasa menempatkan diri sebagai Pers Pembangunan.

Tanggal 20 Mei 1979, "Bali Post" mulai merintis menerbitkan Edisi Pedesaan dengan "pola baru". Ciri pola yang dimaksudkan itu antara lain, koran pedesaan tidak gratis tetapi murah. Harga murah ini dimungkinkan karena disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Di pedesaan dibentuk kelompok Pembaca yang dipadukan dengan kelompok pendengar, pemirsa dan penulis pedesan, dalam kesatuan kelompok yang disebut KP 4. Tidak sedikit peneliti, pengamat dan mahasiswa, dari dalam dan luar negeri, yang ingin mengkaji lebih jauh pengelolaan Koran Masuk Desa di Indonesia, mengadakan studi di Bali khususnya di "Bali Post".

Disamping darma baktinya pada pembangunan nasional antara lain lewat penerbitan Koran Masuk Desa tak terputus dari tahun 1979 hingga sekarang itu, dalam rangka mengisi hakikat Pers Pembangunan " Bali Post" juga membangun dirinya. Sejak tahun 1977 "Bali Post" yang hadir dalam edisi Harian, Minggu dan Pedesaan, mulai dicetak mesin offset milik sendiri. Tahun 1982 menempati gedung baru berlantai tiga. Pembangunan perangkat keras ini berlangsung terus selaras dengan perkembangan teknologi mutakhir.

Di bidang perangkat lunak, Bali Post" secara berencana menyempurnakan manajemen termasuk aspek redaksionalnya. Tenaga-tenaga yang berkemaunan dan berkemampuan diajak turut serta mengelola koran ini, baik di Bali, di daerah Nusa Tenggara, di Jawa Termasuk di Jakarta, dan di daerah-daerah lain di mana "Bali Post" beredar. Sejak April 1986 diterapkan Total quality Control atau Pengendalian Mutu Terpadu dalam manajemennya. Sebanyak 11 group quality Control Circle atau Gugus Kendali Mutu giat mengadakan pertemuan rutin.

Jika dalam kehidupan sehari-hari ditemui banyak "orang Bali Post", baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, menduduki posisi penting dalam pemerintahan, dipenerbitan lain dan di masyarakat, sudah sepatutnya yang paling bangga adalah keluarga besar " Bali Post" karena merasa turut menyumbangkan darma baktinya bagi upaya pencetakan kader-kader bangsa dan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia umumnya.

Siapa saja yang ingin berdarma bakti pada nusa, bangsa dan pembangunan nasional bersama "Bali Post", dapat menghubungi Jalan Kepundung 67 A Denpasar.



Propinsi NUSA TENGGARA BARAT



SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT

Dengan rasa syukur kekhadirat Tuhan Yang Mahakuasa saya menyambut baik terbitnya buku "INDONESIA MEMBANGUN" yang penerbitannya kali ini menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Informasi yang disajikan dalam buku ini merupakan gambaran umum mengenai pelaksanaan hasil-hasil pembangunan di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat. Dari uraian yang disajikan, tergambar adanya peningkatan serta kemajuan yang telah dicapai diberbagai bidang.

Dengan memahami hasil-hasil positif tersebut diharapkan akan semakin menambah kegairahan semua pihak khususnya aparat Pemerintah di Daerah dan juga seluruh lapisan masyarakat di Bumi Gora Nusa Tenggara Barat untuk lebih meningkatkan pengabdian, meningkatkan peran-sertanya dalam melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang. Program pembangunan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan-peningkatan yang dicapai oleh Nusa Tenggara Barat hanyalah merupakan sebagian dari keberhasilan pembangunan nasional yang dilakukan melalui tahapan Repelita dan telah dapat kita rasakan bersama, yaitu dengan semakin meningkatnya kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya.

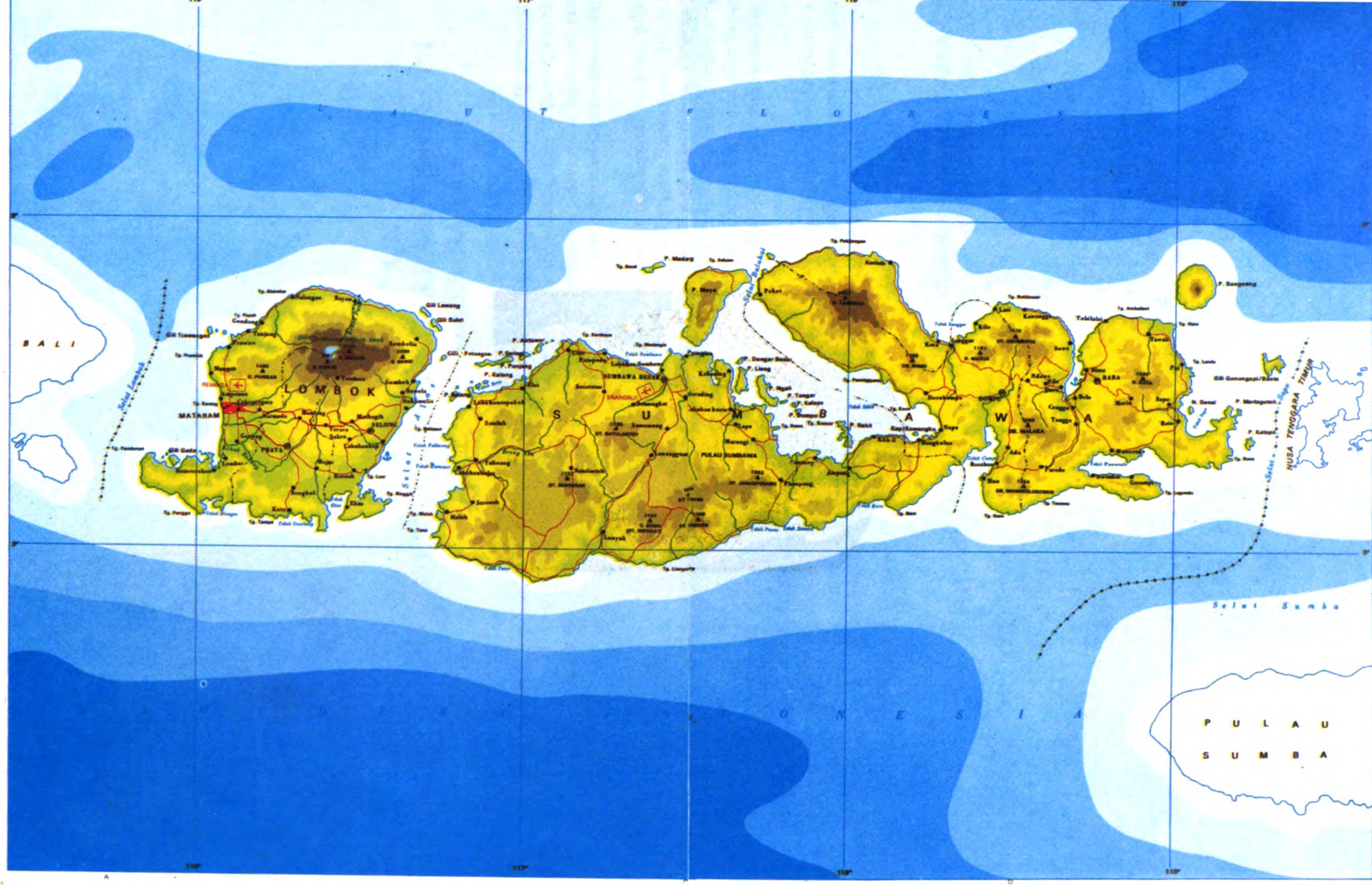
Hasil-hasil tersebut harus kita pertahankan dan tingkatkan terus dalam pelaksanaan Repelita-Repelita selanjutnya. Hambatan-hambatan maupun kekurangan-kekurangan yang dijumpai selama ini hendaknya dapat kita jadikan pengalaman untuk memperbaiki serta untuk memperlancar pembangunan selanjutnya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA BARAT

H. GATOT SOEHERMAN





BALI
Selat Lombok
LOMBOK
MATARAM
SUMBAWA
PULAU SUMBAWA
L A U T   F L O R E S
I N D O N E S I A
Selat Sumba
PULAU SUMBA
NUSA TENGGARA TIMUR

B A B / *CHAPTER I*

M O N O G R A F I / *MONOGRAPHY*

1. Geografi

PROPINSI Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang luasnya 20.153,15 Km2 terdiri dari 2 (dua) pulau Besar yaitu pulau Lombok dengan luas 4.738,4 Km2 dan pulau Sumbawa dengan luas 15.414,75 Km2 serta beberapa pulau kecil lainnya yang mengelilingi kedua pulau tersebut. Secara Administratif, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Administratif, yang seterusnya dibagi menjadi 59 Kecamatan yang meliputi 564 Desa.

Dari keseluruhan pembagian tersebut, 3 (tiga) Kabupaten, 1 (satu) Kota Administratif, 28 Kecamatan dan 264 desa terletak di Pulau Lombok, dan selebihnya ada di Pulau Sumbawa, yaitu 3 (tiga) Kabupaten, 28 Kecamatan dan 301 desa (Lihat Tabel I - 1).

Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta puluhan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar pulau tersebut.

Dalam peta bumi, Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terletak antara 115°46' sampai 119°5' Bujur Timur dan 08°00 sampai 9°7' Lintang Selatan, termasuk dalam gugusan pulau-pulau yang dahulu bernama Sunda Kecil dan sejak tahun 1958 menjadi Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dibatasi oleh laut Jawa di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Selat Lombok di sebelah Barat dan Selat Sape di sebelah Timur.

Gunung yang tertinggi adalah Gunung Rinjani (3.726 meter) di Pulau Lombok dan Gunung Tambora (2.859 meter) di Pulau Sumbawa.

Nusa Tenggara Barat pada umumnya merupakan daerah yang berbukit, berombak, bergelombang. Sedikit sekali terdapat dataran yang luas. Tanah-tanah untuk usaha pertanian kebanyakan terdapat di gunung-gunung, lereng atau lembah-lembah perbukitan/pegunungan.

Iklim Nusa Tenggara Barat pada umumnya adalah iklim tropis. Musim hujan biasanya jatuh pada bulan-bulan Nopember sampai dengan April dan musim kemarau pada bulan-bulan Mei sampai dengan Oktober, dengan beberapa variasi di berbagai tempat. Keadaan ini bersamaan dengan posisi/letak matahari dari garis khatulistiwa, yaitu pada bulan-bulan Nopember, Desember dan Januari matahari berada di sebelah Selatan khatulistiwa.

Pada bulan-bulan tersebut angin bertiup dari arah Barat Daya dengan kelembaban tinggi, temperatur konstan, dan udara selalu ditutupi awan yang menyebabkan jatuhnya hujan (musim penghujan).

Sebaliknya pada bulan-bulan Mei, Juni dan Juli, sewaktu matahari berada di sebelah Utara khatulistiwa, angin bertiup dari arah Tenggara dengan sifat kering dan udara cerah (tidak berawan) sehingga tidak ada hujan (musim kemarau).

Bulan-bulan lainnya merupakan bulan-bulan peralihan.

Bulan-bulan basah dimana curah hujan di atas 760 mm/bulan berkisar antara bulan-bulan kering berkisar antara April sampai Nopember sehingga terdapat 4-6 bulan basah dan 6-8 bulan kering.

Curah hujan rata-rata per tahun ± 1.500 - 2.000 mm dan hari hujan rata-rata 86 hari/tahun.

Temperatur rata-rata di Daerah Nusa Tenggara Barat adalah 26,3°C dengan minimal 20,4°C dan maximal 31,5°C dengan beberapa variasi sesuai dengan tinggi tempat di atas permukaan laut.

Fluktuasi temperatur antara siang dengan malam dan antara musim kemarau dengan musim hujan tidak terlalu besar.

Menurut catatan kecepatan angin dan kelembaban udara di stasiun Meteorologi Rembiga Pelabuhan Udara Selaparang kecepatan angin rata-rata 1,3 knot/jam. Angin kencang biasa bertiup pada bulan Januari dengan kecepatan rata-rata 10 knot/jam. Kelembaban udara rata-rata 82%.

Berdasarkan hasil survey Lembaga Penelitian Tanah Bogor Tahun 1976 di Daerah Nusa Tenggara Barat, terdapat 5 kelompok tanah dengan 28 jenis/macam yang lokasinya tersebar.

Kelima kelompok tanah tersebut adalah kelompok Aluvial, kelompok Regosol, kelompok Grumusol, kelompok Mediteran dan kelompok tanah-tanah komplek.

Di Pulau Lombok tanah Regosol mempunyai daerah penyebaran yang terluas yaitu ± 36 persen dari seluruh wilayah Pulau Lombok, selanjutnya tanah Grumusol ± 25 persen, Mediteran Merah Kuning 23,5 persen Brown Forest Soil seluas ± 11,6 persen dan Aluvial seluas ± 3,9 persen.

1. Geography

THE PROVINCE of West Nusa Tenggara has a total area of 20,153.15 Km2, consisting of two big islands, i.e. Lombok (4,738.4 Km2) and Sumbawa (15,414.75 Km2). Besides, there are a number of small islands in the surrounding of the two big islands. The Province of West Nusa Tenggara is divided into 6 districts and 1 administrative municipality. In total, there are 59 sub-districts and 564 villages.

Three districts and one administrative municipality comprising 28 districts and 264 villages are found in Lombok Island, while the rest, 28 sub-districts and 301 villages making three districts in Sumbawa Island. See Tables I-1.

Tabel / *Table I - 1*
PEMBAGIAN WILAYAH PEMERINTAHAN PROPINSI
DATI I NUSA TENGGARA BARAT
ADMINISTRATIVE REGIONAL UNITS IN WEST NUSA TENGGARA

Kabupaten/Kota Administratif *District*	Jumlah Kec *Sub-district*	Jumlah Desa *Villages*	Keterangan *Remarks*
1 Kabupaten Dati II Lombok Barat *) *District Lombok Barat*	12	83	*) termasuk Kota Administratif Mataram **) Including the Administrative Municipality of Mataram*
2 Kabupaten Dati II Lombok Tengah *District Lombok Tengah*	9	85	
3 Kabupaten Dati II Lombok Timur *District Lombok Timur*	10	96	
4 Kabupaten Dati II Sumbawa *District Sumbawa*	14	119	
5 Kabupaten Dati II Dompu *District Dompu*	4	38	
6 Kabupaten Dati II Bima *District Bima*	10	143	
Nusa Tenggara Barat/Jumlah *West Nusa Tenggara/Total*	59	564	

The Province of West Nusa Tenggara is located between 115°46' and 119°5' East longitude and between 08°0' and 9°7' South latitude. The area belongs to the lesser sunda island group, forming a province since 1958. It borders with the Java Sea on the North, the Indonesian Ocean on the South, the Lombok Strait on the West and the Sape Strait on the East.

The highest mountains are Mt. Rinjani (3,726 m) in Lombok and Mt. Tambora (2,859 m) in Sumbawa. In general the area is mountainous and hilly. Vast plains are few in number. Agricultural fields are mostly found in mountainous areas and in valleys.

West Nusa Tenggara has a tropical climate. Rain falls in November through April, and the dry monsoon from May through October, with variations in a number of places. During the months of November, December and January the wind blows from South-west with a high humidity, constant temperature and cloudy, resulting in rainy season. On the other hand, during May, June and July, the wind blows from South east with very low humidity, thus inducing no rain (dry monsoon).

The others are transitional months.

During the wet monsoon (December - March), rainfall exceeds 760 mm/month, while the dry season lasts from April through November.

The average rainfall per annum is recorded between 1,500 to 2,000 mm and the number of rainy days 86 days per annum. Average temperature is 26.3°C with a minimum of 20.4°C and a maximum of 31.5°C and variations according to height above sea level. Temperature fluctuation between day and night and between dry season and wet monsoon is not substantial.

According to record of the Rembiga Meteorological Station in Selaparang Airport, the average wind velocity is 1.3 knot per hour. Strong wind blows in January with average velocity of 10 knots/hour. The average air humidity is 82%.

A survey by the Bogor Soil Study Centre held in 1976 reveals that the West Nusa Tenggara region owns 5 groups of soil, i.e. the Alluvial, Regosol, Grumusol, Mediterranian and Complex soil groups. They are further divided into 28 different types with scattered locations.

In Lombok Island, the Regosol covers the biggest spread, i.e. 36% of the island's total land surface. Next comes the Grumusol with 25%, to be followed

Penanaman padi dan palawija terutama diusahakan pada tanah-tanah Regusol, Grumosol dan Aluvial. Semua jenis tanah yang diusahakan pada umumnya mempunyai kadar zat organik dan Nitrogen yang rendah.

Berbeda dengan di Pulau Lombok, di Pulau Sumbawa kebanyakan terdapat tanah komplek Mediteran. Tanah komplek Litosol Mediteran coklat kemerahan dan Mediteran coklat merupakan tanah yang terluas di daerah ini yaitu ± 65 persen dari seluruh wilayah Pulau Sumbawa, sedangkan tanah komplek Mediteran coklat dan Litosol ± 10 persen, kelompok Regosol kelabu dan Litosol ± 9 persen, komplek Mediteran coklat dan Mediteran kemerahan ± 8 persen serta selebihnya adalah tanah-tanah komplek lainnya yang terpencar dan setempat.

Penggunaan tanah di Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1 Sawah berpengairan	159.762 Ha.
2 Sawah tadah hujan	17.958 Ha.
3 Ladang/tegalan	168.016 Ha.
4 Perkebunan	81.530 Ha.
5 Tambak dan penggaraman	3.316 Ha.
6 Padang rumput dan alang-alang	250.348 Ha.
7 Perkampungan	8.500 Ha.
8 H u t a n	1.248.904 Ha.
9 Lain-lain	76.921 Ha.

Pada permukaan bumi terdapat air laut dan air darat yang termasuk air darat ialah air permukaan (surface water) dan air tanah (ground water). Yang akan diuraikan disini hanyalah mengenai air daratan yang meliputi air permukaan dan air tanah.

Air permukaan terdiri dari sungai, danau dan mata air yang berguna sebagai pengatur iklim, sumber mineral, barriere, penghubung sumber makanan dan juga berguna sebagai sumber persediaan air minum, tenaga listrik dan irigasi.

Sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat pada umumnya sungai-sungai dengan type hujan, yaitu sungai-sungai di mana debit airnya banyak ditentukan oleh curah hujan. Pada sungai type demikian biasanya airnya keruh banyak mengangkut pasir dan tanah, alirannya deras terutama pada musim hujan, sedangkan di musim kemarau hampir tidak berair malahan ada yang kering. Sungai type ini umumnya terdapat di Pulau Sumbawa dan sebagian lagi di Pulau Lombok. Sungai-sungai ini sangat dipengaruhi oleh vegetasi dan dengan vegetasi yang sempurna tentunya dapat dicegah hanyutnya tanah di sungai-sungai itu. Hubungan yang erat antara air sungai, tanah dan vegetasi serta hutan tampak jelas. Dewasa ini Nusa Tenggara Barat memiliki areal kawasan hutan seluas 1.178.904 Ha atau 62,90% dari luas wilayah yang kondisinya 20,28% dalam keadaan rusak.

Pemanfaatan air sungai selain untuk air minum dan keperluan sehari-hari, dipergunakan pula untuk irigasi dan keperluan industri, serta sumber tenaga listrik masih belum dimanfaatkan. Banyaknya aliran sungai sangat menguntungkan bagi pengairan persawahan. Pada umumnya sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat sebagian telah dimanfaatkan untuk keperluan pertanian yaitu dengan pembangunan waduk, Dam dan bendungan-bendungan irigasi secara modern oleh Pemerintah maupun secara tradisional dan kecil-kecilan oleh masyarakat petani sendiri. Di samping itu terdapat waduk-waduk kecil atau embung yang dibuat masyarakat karena tofografi tanahnya sedemikian rupa dan bermanfaat untuk menampung kelebihan air di musim hujan dan digunakan untuk menunda kekeringan saat kemarau serta sebagai pengawetan tanah sekitarnya, pemeliharaan itik, ikan dan lain-lain.

2. P e n d u d u k

a. Pertumbuhan Penduduk

Salah satu faktor terpenting mengenai kependudukan di daerah Nusa Tenggara Barat yang menimbulkan masalah utama di dalam pembangunan adalah adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk pada umumnya disebabkan tingginya tingkat kelahiran disatu pihak, disamping adanya penduduk yang masuk/pindah kedaerah Nusa Tenggara Barat.

Hasil sensus penduduk yang pertama tahun 1930, memperlihatkan jumlah penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat sekitar 1.016.000 jiwa. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang kedua yang dilaksanakan pada tahun 1961 (Oktober) penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat sudah mencapai 1.809.830 jiwa. Dengan demikian selama periode tahun 1930-1961, penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat telah bertambah sejumlah 791.830 jiwa, atau rata-rata pertahun bertambah 1,56%. Dari keadaan ini nampak bahwa selama periode tersebut penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat meningkat sekitar 178% atau 1 3/4 kali.

Menurut hasil sensus penduduk berikutnya yang dilaksanakan pada tahun 1971 (September), jumlah penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat telah mencapai 2.203.435 jiwa, yang terdiri dari 1.087.461 laki-laki dan 1.115.974 perempuan.

by reddish yellow Mediterranian with 23.5%, brown forest soil 11.6% and Alluvial 3.9%.

Paddy and second crops cultivation is mainly undertaken in Regosol soil, Grumusol and Alluvial. The organic and nitrogen content is usually low.

The Island of Sumbawa is dominated by the Mediterranian type. The reddish-brown Litosol Mediterranian and brown Mediterranian make 65% of Sumbawa's total land surface, while brown Mediterianian and Litosol 10%, gray Regosol and Litosol 9%, brown Mediterranian and reddish Mediterranian 8%.

Land use in West Nusa Tenggara can be given as follows :

1. Irrigated rice field	*159,762 Ha.*
2. Rain-fed rice field	*17,958 Ha.*
3. Arid land cultivation	*168,016 Ha.*
4. Plantation	*81,530 Ha.*
5. Brackish pond and salt-making area	*3,316 Ha.*
6. Fallow land	*250,348 Ha.*
7. Settlement	*8,500 Ha.*
8. Forest	*1,248,904 Ha.*
9. Others	*76,921 Ha.*

The rivers in West Nusa Tenggara are generally the rain-fed type: the water debit depends substantially to rainfall. The water is usually muddy with sand and soil. During rainy season the waterflow is fast, while in dry climate the water debit is very low and even dry. Rivers of this type are generally found in Sumbawa Island and a few in Lombok Island. Vegetation plays an important role to prevent erosion in such rivers. It explains the interrelation between river, soil, vegetation and forest area. At present West Nusa Tenggara has a forest area of 1,179,904 Ha, making 62.90% of the total area. About 20.28% of the forest area is in damaged condition.

River water is used for domestic need, irrigation, industry as well as power generation (although the rate of exploitation is still low). The many branches of rivers enhance irrigation. Rivers in West Nusa Tenggara are generally exploited for irrigation with the construction of reservoirs, dam and irrigation networks, modern as well as traditional. Besides, people also build small reservoirs (called embung) to contain spillover during rainy season. In addition to overcome long draught, these small reservoirs are also used to preserve soil structure as well as for duck breeding and fishery exploit.

2. Population

a. Population Growth

One of the dominant population factors in West Nusa Tenggara which causes problem to development is the high rate of population growth. The growth is due to the high rate of birth and the decreasing rate of mortality as well as migration to the region.

The population census of 1930 recorded 1,016,000 persons in West Nusa Tenggara. The figure rose to 1,807,830 in the 1961 population census, making an annual growth of 1.56% during the period of 1930 - 1961.

According to the 1971 population census, the population of West Nusa Tenggara was 2,203,435 person, comprising of 1,087,461 males and 1,115,974 females, making an annual growth of 1.979% during the two censuses. The population registration in 1976 showed that the population of West Nusa Tenggara was 2,480,775 persons, making an annual growth of 2.258% during the period of 1971 - 1976. See Table 1-2.

The lowest growth rate per district is Bima with an annual growth of 1.841%, the highest is Dompu by 2.747%. During the period of 1961 - 1971, three districts recorded above the average growth rate, i.e. Lombok Barat 2.156%, Sumbawa 2.196% and Dompu 2.747%, while three others below average: Lombok Tengah 1.884%, Lombok Timur 1.866% and Bima 1.841.

b. Population Distribution

In addition to high growth rate, uneven distribution of population also springs many problems of development. The uneven distribution pattern is seen in comparison between islands, districts and between urban and rural areas. Most of the population live in Lombok Island (1971) Census: 71.81%; 1961 Census: 71.92% ; 1976 Registration: 71.91%.

By district, population distribution did not experience a significant change of rank composition during 1961, 1971 and 1976, where Lombok Timur remained topping the listh and Dompu at the lowest rank.

c. Population Density

The density of population in West Nusa Tenggara rose from 90 persons/km2 in 1961 to 109 persons/km2 in 1971 and 123 persons/km2 in 1976. The density of population in Lombok Island is much higher than that of Sumbawa Island. Population density in Lombok Island went up from 274

Dibandingkan dengan hasil Sensus penduduk tahun 1961, disini nampak dengan jelas bahwa Sensus tahun 1971, penduduk Nusa Tenggara Barat bertambah sebanyak 395.605 jiwa. Angka ini memberi petunjuk rata-rata pertambahan penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat selama periode kedua Sensus itu sekitar 1,979% per tahun.

Dengan demikian rata-rata pertambahan penduduk pertahun selama periode 1961-1971 lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertambahan penduduk pertahun selama periode Sensus pertama (1930) dan sensus ke dua (1961).

Selanjutnya, untuk mengetahui gambaran mengenai rata-rata pertambahan penduduk dari 1971 sampai 1978, dimanfaatkan data hasil registrasi penduduk. Dari hasil registrasi penduduk akhir tahun 1976 (Biro Pusat Statistik) diperoleh angka, jumlah penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat akhir tahun 1976 adalah 2.480.775 jiwa.

Dari data ini diperoleh gambaran, rata-rata pertambahan penduduk selama periode 1971-1976 sebesar 2,258% pertahun. (Lihat tabel I - 2).

Kalau dilihat perdaerah Tingkat II (Kabupaten), tingkat pertumbuhan yang paling rendah terdapat di Kabupaten Bima yaitu sebesar 1,841% pertahun, sedangkan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi di Kabupaten Dompu yaitu sebesar 2,747% pertahun. Selama periode 1961-1971, dari enam Kabupaten terdapat tiga Kabupaten yang mencapai tingkat pertumbuhan rata-rata penduduknya pertahun diatas angka tingkat pertumbuhan rata-rata Daerah Nusa Tenggara Barat. Kabupaten tersebut adalah : Lombok Barat (2,156%), Sumbawa (2,196%). Sedangkan Tiga Kabupaten lainnya tingkat perkembangan penduduknya rata-rata dibawah tingkat perkembangan penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Lombok Tengah (1,884%), Lombok Timur (1,866%) dan Bima (1,841%). Kalau dilihat lebih lanjut angka hasil registrasi penduduk akhir tahun 1976, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk selama periode 1971-1976 lebih tajam dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada periode 1961-1971.

2. Penyebaran Penduduk

Disamping tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi penyebaran penduduk yang tidak merata secara geografis merupakan pula sumber banyak masalah dalam pembangunan. Dari hasil kedua Sensus Penduduk tahun 1961 dan 1971 terlihat bahwa pola penyebaran penduduk di daerah Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan tidak merata, baik dilihat dari penyebaran antara pulau dan Kabupaten maupun penyebaran antara Kota dan pedesaan. Penyebaran ini mempunyai ciri khusus dimana sebagian besar daripada penduduknya berdiam di Pulau Lombok. Ciri khusus ini tidak hanya terjadi pada saat Sensus 1971, dimana 71,81% penduduknya bertempat tinggal di Pulau Lombok sedangkan sisanya 28,19% bertempat tinggal di Pulau Sumbawa, tetapi terjadi pula pada Sensus sebelumnya, (1961) dimana sebanyak 71,92% penduduknya bertempat tinggal di pulau Sumbawa. Dari hasil Registrasi pada tahun 1976 terlihat pula bahwa sebanyak 71,91% penduduk Nusa Tenggara Barat berdiam di Pulau Lombok dan 28,09% bertempat tinggal di pulau Sumbawa.

Kalau ditinjau penyebaran penduduk per Kabupaten maka akan nampak dengan jelas bahwa dalam tahun 1961, 1971 dan tahun 1976 tidak terjadi pergeseran urutan daripada jumlah penduduk dimana Lombok Timur tetap menempati urutan pertama sedangkan Kabupaten Dompu tetap menduduki urutan yang terakhir dari tahun ke tahun.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Nusa Tenggara Barat pada tahun 1961 adalah 90 jiwa/km2. Pada tahun 1971 meningkat menjadi 109 jiwa/km2, dan pada tahun 1976 mencapai 123 jiwa/km2. Kalau dilihat kepadatan penduduk per pulau, secara umum dapat dikatakan pulau Lombok lebih padat penduduknya dibandingkan dengan kepadatan penduduk pulau Sumbawa. Kepadatan penduduk Lombok tahun 1961-274 jiwa/km2, tahun 1971 - 334 jiwa/km2 dan tahun 1976 - 376 jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk pulau Sumbawa pada tahun 1961 adalah 33 jiwa/km2, tahun 1971 - 40 jiwa/km2 dan tahun 1976-45 jiwa/km2. Dari angka-angka itu dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk pulau Lombok mencapai lebih dari 8 kali lipat dibandingkan dengan kepadatan penduduk pulau Sumbawa. Hal ini diperkirakan akan terjadi pada setiap tahunnya.

Perbedaan yang cukup besar dari kepadatan penduduk ini disebabkan sebagian besar penduduk daerah Nusa Tenggara Barat atau (sekitar 71,9%) bertempat tinggal di pulau Lombok yang luasnya hanya sekitar 23,51% dari luas wilayah Nusa Tenggara Barat sedangkan Pulau Sumbawa hanya didiami oleh sekitar 28,1% dari seluruh penduduk, padahal wilayahnya sekitar 76,49% dari luas wilayah Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Sumbawa dimana kepadatan penduduknya tahun 1961 - 23 jiwa/Km2 dan tahun 1976 - 33 jiwa/Km2. Untuk memperoleh gambaran yang

persons/km2 in 1961 to 334 persons/km2 in 1971 and 376 persons/km2 in 1976. The figures for Sumbawa Island are 33 persons/km2 in 1961, increased to 40 persons/km2 in 1971 and 45 persons/km2 in 1976.

The great disparity between Lombok Island and Sumbawa Island is due to the fact that the greater number of West Nusa Tenggara population (about 71.9%) live in Lombok Island which makes only 23.51% of the total area, while Sumbawa Island -- constituting 76.49% of the total area -- is inhabited by 28.1% of the population.

In 1981 the population of West Nusa Tenggara numbered 2,767,247 persons, 781,463 in Sumbawa Island and 1,985,784 in Lombok Island, The density of population was 51 persons/km2 in Sumbawa Island and 419 persons/km2 in Lombok Island.

Tabel / *Table I - 2*
JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1930 - 1980
POPULATION GORWTH OF WEST NUSA TENGGARA, 1930 - 1980

Tahun / *Year*	Jumlah penduduk (Jiwa) / *Population (persons)*	Pertambahan (Jiwa) / *Growth (persons)*	Pertambahan per-tahun (%) / *Annual Growth (%)*
1930	1.016.000	-	-
1961	1.807.830	791.830	1,859
1971	2.215.517	408.079	1,979
1972	2.266.517	50.608	2,258
1973	2.318.281	51.764	2,258
1974	2.371.227	52.946	2,258
1975	2.425.383	54.156	2,258
1976	2.480.775	55.392	2,258
1977	2.537.433	156.655	2,258
1978	2.595.384	57.751	2,258
1980	2.733.086	137.702	2,654

Sumber : Biro Pusat Statistik
Source : Central Bureau of Statistics

Keterangan
1. Angka tahun 1930, 1961, 1971 dan 1980 berdasarkan hasil Sensus (BPS)
2. Angka tahun 1971 adalah perkiraan akhir tahun dari hasil Sensus tahun 1971
3. Angka tahun 1976, berdasarkan hasil registrasi (BPS)
4. Angka tahun lainnya diperkirakan dengan rumus : Pn = Po Rn : dimana r = 2,258%

Note :
1. ***The figures for 1930, 1961, 1971 and 1980 are taken from population Censuses by the Central Bureau of Statistics.***
2. ***The figure for 1971 is an estimate at the end of 1971 based on the Population Census of 1971.***
3. ***The figure for 1976 is based on the result or population registration.***
4. ***The figures for the other years are the results of computation with the formula : Pn = Po. rn where r = 2.258%.***

By district, population density is highest in Lombok Timur (451 persons/km2), to be followed by Lombok Tengah (412 persons/km2), Lombok Barat (391 persons/km2), Bima (80 persons/km2), Dompu (42 persons/km2) and Sumbawa (36 persons/km2). See Table I-3.

d. Living Means

Most of the people in West Nusa Tenggara live as farmers, merchants, employees and labourers. Generally, farmers stay near their rice fields. Arid land agriculture is begun with the selection forest part to be opened as as cultivation field a couple of months before the start of rainy season. The trees, big and small, are cut down. A number of weeks later, the dried trees are burned. Then a hut is built on the outskirt or in the middle of the field as temporary dwelling. Two weeks before the rain comes, the seeds are sown by use of dibbles. As a matter of tradition, they do it in mutual assistance.

Ever since the field is guarded. A fence is built in the circumference to ward off beasts such as boars, deers, porcupines as well as cattles such as buffaloes, horses, cows and goats. Before the plants bear fruits, farmers only come occasionally if the fence has been in good order. They come to weed or to replace dead plants. Meanwhile, they can tend to other business. Some of the farmers stay at their fields until harvest. In a number of places in West Sumbawa, the fields become crowded while the villages as if deserted. Only after harvest do they return to the villages and indulge in various feasts.

After paddy harvest, they sow the seeds of second crops. The second crops plantation will be followed by another until the planting season of paddy. In between busy times, they use their leisure to go picnicking or camping (in the local dialect of the Sasak: belangon).

Most people in urban areas live as government employees, labourers and merchants. During the holidays they frequent recreation centres or go to their villages of origin and stay there during the holidays. In order that the whole family can go together, the employees usually take their leave during school vacation. Sometimes they go to the cinema. Labourers generally use their leisure time in chitchatting with the neighbours or friends, especially at night before bed-time. Meanwhile, merchants use up their time to manage their business.

Many people in West Nusa Tenggara have the hobbies of rearing

lengkap mengenai urutan kepadatan penduduk dari enam Kabupaten ini, maka disini dapat dikemukakan sebagai berikut : Pertama Kabupaten Lombok Timur, menyusul Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan terakhir Kabupaten Sumbawa.

Penduduk Daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 1981 berjumlah 2.767.247 dengan perincian penduduk Pulau Sumbawa, 781.463 dan Pulau Lombok sejumlah 1.985.784. Dengan demikian kepadatan penduduk di Pulau Sumbawa adalah 51 jiwa/Km2. Sedangkan Pulau Lombok kepadatannya 419 jiwa/Km2.

Dari angka-angka di atas nampak bahwa secara geografis penyebaran penduduknya tidak merata. Sedangkan mengenai laju pertumbuhan penduduk di daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1980 adalah 2,36% pertahun.

Selanjutnya apabila dilihat kepadatan penduduk per Kabupaten, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur yaitu 451 jiwa/Km2, kemudian berturut-turut adalah Kabupaten Tingkat II Lombok Tengah 412 jiwa/Km2, Kabupaten Lombok Barat 391 jiwa/Km2, Kabupaten Bima 80 jiwa/Km2, Kabupaten Dompu 42 jiwa/Km2 dan Kabupaten Sumbawa 36 jiwa/Km2 (Lihat Tabel I - 3).

turtledoves, race-horses and fighting cocks. Turtledove contests and horse-races are usually organized in commemoration of national/regional days.

Clay pottery is still widely practiced and used in West Nusa Tenggara. For example, cooking pot, earthenware, jars, etc. Household utensils made of stone include cone grinders, betel grinders, soy-bean grinders, etc.

Black-smiths of West Nusa Tenggara produce machetes, knives. Tray and shade are traditionally made of bamboo, wood and palmyra palm leaves. Traditional fire-makers include a piece of steel, flint and arenga-palm hair (called percek in Sasak language); or two pieces of dry twig rubbed together. Fire-blowers can be made of hide, bamboo joint or a fan made of bamboo and kerre palm leaves.

The main staples food is rice. Paddy planting and harvesting are mostly done by women. Men do the preparatory cultivation of land. Men also manage the transport of paddy seedplants, the drying and the storing in the rice barn. Paddy pounding is done by women. But now hullers do most of the pounding. In the old days, rice was cooked in clay pots.

Vegetables, edible roots, nuts and beans, meat and milk are also popular dishes among the people of West Nusa Tenggara. In condition of supply scarcity, nuts, beans and edible roots may replace rice as staplefood.

Tabel / ***Table I - 3***

LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KABUPATEN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1961, 1971 DAN 1976

AREA AND POPULATION DENSITY IN WEST NUSA TENGGARA BY DISTRICT, 1961, 1971, 1976

Kabupaten / *District*	Luas Areal (Km2) / *Area*	Sensus/*Census 1961*		Sensus/*Census 1971*		Registrasi/*Registration 1976*	
		Penduduk / *Population*	Kepadatan / *Density*	Penduduk / *Population*	Kepadatan / *Density*	Penduduk / *Population*	Kepadatan / *Density*
Pulau Lombok	4.738,7	1.300.234	274	1.582.325	334	1.783.904	376
1 Lombok Barat	1.705,5	410.958	241	509.812	299	574.187	337
2 Lombok Tengah	1.427,6	395.078	277	476.986	334	531.805	373
3 Lombok Timur	1.605,6	494.198	308	595.527	371	677.912	422
Pulau Sumbawa	15.414,5	507.596	33	621.110	40	696.871	45
4 Sumbawa	8.493,0	195.554	23	243.577	29	276.130	33
5 Dompu	2.324,6	56.318	24	74.120	31	84.621	36
6 Bima	4.596,9	255.724	56	303.413	66	336.120	73
Jumlah/*Total*	20.153,2	1.807.830	90	2.203.435	109	2.480.775	123

Sumber : *1 Luas areal : Direktorat Agraria Dati I NTB*
2 Jumlah Penduduk Biro Pusat Statistik
1. Area Directorate of Agrarian Affairs NTB Provinve
2. Population Central Bureau of Statistics.

d. Mata Pencaharian.

Mata pencaharian penduduk Nusa Tenggara Barat terdiri dari : petani, pedagang, pegawai dan buruh. Pada umumnya petani hidup di desa sekitar tanah pertanian dan ladang mereka. Bagi mereka yang hidup dengan berladang, beberapa bulan sebelum turun hujan, mereka pergi ke hutan-hutan yang bukan hutan larangan. Ada yang dengan seijin Kepala Desa, yang berlaku di daerah berpenduduk padat. Ada pula tanpa ijin, berlaku di daerah berpenduduk jarang.

Mula-mula mereka memberi tanda di pohon-pohon sekeliling tanah yang dipilihnya. Beberapa minggu atau bulan setelah itu mereka menebang kayu yang besar dan yang kecil. Lalu setelah kering, sekeliling tanah yang telah ditebang pohonnya itu dibakar. Kemudian di pinggir atau di tengah ladang itu dibangun pondok. Dua minggu sebelum mulai turun hujan, benih-benih ditanam. Menanamnya cukup dengan membuat lubang dengan tongkat kayu atau tugal yang ujungnya diruncingi. Mereka bertanam secara gotong royong.

Sejak itu ladang mulai dijaga dan peladang membuat pagar yang melingkari ladangnya untuk menjaga gangguan tanaman dari binatang liar seperi babi, rusa, landak dan binatang lainnya seperti kerbau, kuda, sapi dan kambing. Sebelum tanaman berbuah, ladang cukup dilihat sewaktu-waktu saja asal pagar sudah baik. Hanya datang untuk yang perlu-perlu saja, seperti menyiangi rumput dan menyisipi tanaman-tanaman yang tidak tumbuh. Sementara itu petani dapat mengerjakan pekerjaan yang lain seperti mengurus sawah dan ternaknya. Tetapi bagi yang hidup dari hanya berladang maka ia menetap sejak tanamannya mulai tumbuh. Beberapa daerah di Sumbawa Barat dan di daerah Donggo (Sumbawa Timur) sejak mulai menyiangi rumput sampai panen selesai, ladang-ladang menjadi ramai dan kampung-kampung sepi. Setelah panen, kampung ramai kembali dan penduduknya bersuka ria melaksanakan pesta panen yang menjadi tradisi.

Before World War II, almost ever woman in West Nusa Tenggara was skillful in spinning and weaving. It was said that a girl was considered to be marriageable if she had mastered the art of weaving. Cotton was locally produced on the field. Cotton-picking was the domain of women. Cotton grain separation is called golong in the local language. The loosening of cotton fibre is done by a gadget called betuk. The loosened fibre is pooled like a stick of candle, ready for spinning. Further process is just like other traditional weaving.

e. Socio-culture

In West Nusa Tenggara, especially in the villages, rich people or wealthy people are centre of hopes of the community. The haves are expected to provide help in time of difficulties and in case of internal and external sufferings. If the haves breaks this tradition or escape from such condition, they will be shunered from the community. Their prestige and self-esteem will decrease. If a rich person tightly keeps his weelth or pursue his own interest, then any time he suffers bad luck the community will never give heed to him. In Sasak tribe, mutual-aid is popularly known, among others: bedea = ask for unhulled rice / rice by exchanging it with coffee, sugar, or salt ; nempil = to buy good with cheoper price ; ngendeng = to ask something (rice, unhulled-rice, maize or sweet potatoes) from fellows with reinbursement.

To respect one another in social life determines how people should behave to towards his relatives and how people should behave towards other people es fellows as acquintances, even towards strangers.

If Ego represents Sumbawa tribe or Bima tribe as well as Sasak tribe, he behaves gently and affectionately. His attitude and politeness as a father are exemplary. Towards his wife he acts as protector. Ego's wife has to speak politely to her husband. When eating she should give precedence to Ego rather than she and her children. The children give more respect to their father rather than to their mother. If they speak to their father it is a taboo to look at their father's face, besides they have to behave politely. So does Ego, he

Bagi petani yang bercocok tanam dan menetap hampir sepanjang waktu terus sibuk. Sejak membibit sampai selesai bertanam, istirahat sebentar. Seterusnya menyiangi rumput dan memupuk tanaman. Setelah selesai, istirahat kembali. Saat panen sibuk kembali sampai padi masuk lumbung. Sambil panen mereka menabur bibit palawija atau bila padi telah selesai dituai, siangnya mengurus tanaman palawija, malam mengikat padi dan sebagainya. Selesai menanam sampai masa panen palawija, istirahat lagi. Demikianlah sehabis panen palawija yang satu, diganti dengan palawija yang lain sampai datang waktu menanam padi lagi. Di tengah-tengah kesibukan di sawah, dipergunakan petani untuk berpesta dan pesiar atau berkemah (bahasa Sasak : belangon) di tepi pantai.

Masyarakat kota yang kebanyakan Pegawai Negeri, buruh dan pedagang, selalu sibuk dengan tugas sehari-hari. Pagi ke kantor, pulang siang, istirahat sebentar kemudian bangun duduk-duduk dengan keluarga atau bertamu ke rumah teman/kenalan. Pada hari-hari libur mereka pergi ketempat-tempat rekreasi atau pulang ke desa dan tinggal di sana selama liburan. Agar supaya dapat pulang serempak dengan keluarga, maka cuti kebanyakan diambil pada waktu liburan sekolah. Kadang kala sekali seminggu, mereka menonton film.

Bagi buruh-buruh kecil lain pula caranya. Waktu senggangnya kebanyakan dihabiskan untuk mengobrol dengan tetangga atau sahabat/kenalannya, terutama waktu malam sebelum tidur. Bagi pedagang, seluruh waktunya dicurahkannya untuk mengurus keperluan dagangannya. Sehingga hampir semua hubungan yang diadakannya ditujukan untuk keperluan dagangan mereka. Karena itu merekapun seperti menjadi kelompok antara sesama pedagang.

Antara berbagai golongan penduduk tersebut di atas terdapat kegemaran yang sama, seperti memelihara burung perkutut, kuda pacuan dan ayam sabungan bagi masyarakat Hindu. Mengunjungi keramaian-keramaian dan menonton film dan pertandingan-pertandingan olah raga. Burung perkutut sering diperlombakan dalam bentuk konkurs pada hari-hari raya nasional dan daerah. Begitu juga pacuan kuda sering diadakan sehubungan dengan hari-hari besar.

Perabot rumah tangga masyarakat kota dibeli di toko-toko, kadangkala berupa alat-alat tradisional seperti tungku tanah liat, periuk dan belanga tanah liat. Masyarakat desa masih banyak mempergunakan alat-alat tradisional terbuat dari batu dan tanah liat seperti periuk, belanga, cawan dan pinggan ataupun gentong tempat menyimpan air. Alat-alat seperti itu masih diproduksi di beberapa desa di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Alat-alat rumah dari batu, seperti penggiling sambel, penumbuk sirih, penggiling jagung, penggiling tahu dan lain-lain. Ada yang produksi dalam daerah dan produksi dari luar daerah.

Alat-alat rumah tangga yang terbuat dari besi seperti : parang, pisau kebanyakan buatan di dalam daerah, oleh pande besi yang tersebar di beberapa desa. Alat lain seperti wadah dan penutup dibuat dari bambu, kayu dan daun lontar yang dikerjakan oleh kaum wanita. Untuk menyalakan api kebanyakan sudah memakai korek api, kayu yang dibelinya dari toko-toko. Alat menyalakan api yang tradisional berupa sepotong besi waja, batu api dan lulup (= diambil dari batang enau yang terdapat di antara batang dengan pangkal pelepah enau). Alat membuat api semacam di atas dalam bahasa Sasak disebut : percek. Dengan cara dipukul-pukulkan besi pada batu api menimbulkan percikan api dan membakar lulup. Cara lain ialah dengan musut (mengebor kayu kering dengan kayu kering). Akibat pergesekan menimbulkan panas dan membakar serbuk kayu. Alat meniup terbuat dari kulit yang disebut kepes, seruas bambu dan ada pula yang dibentuk berupa kipas terbuat dari bambu dan kerre (sejenis palma).

Makanan masyarakat Nusa Tenggara Barat sekarang sudah terpengaruh oleh tehnologi dan perekonomian modern. Makanan utama adalah nasi. Mereka juga memakan sayur-mayur, daun-daunan, akar-akaran (umbi-umbian), biji-bijian, daging dan susu. Untuk memenuhi hajat hidup mereka menanam padi di sawah atau di ladang. Pekerjaan menanam dan mengetam padi kebanyakan dilakukan oleh wanita. Kaum laki-laki mempersiapkan tanah, mengangkut benih dari persemaian sawah, memulangkan padi, mengikat padi, menjemur dan memasukkannya ke lumbung. Sedangkan pekerjaan menumbuk banyak dilakukan oleh wanita. Pada akhir-akhir ini penggilingan padi (huller) sudah merata di desa-desa sehingga pekerjaan menumbuk semakin berkurang. Banyak diantara penduduk yang lebih suka membawa padinya ke penggilingan daripada menumbuk sendiri. Zaman dahulu nasi dimasak (ditanak) dengan periuk. Yang membuat periuk adalah golongan keluarga tertentu. Sekarang sudah banyak yang memasak dengan panci atau dandang.

Sayur mayur diperoleh dengan membeli atau ditanam sendiri. Begitu pula umbi-umbian, seperti : ubi dan ketela. Mereka yang tidak menanam sendiri, memperoleh sayur dengan cara membeli. Demikian pula biji-bijian. Daging dapat dibeli di pasar atau pada pedagang keliling atau dengan berburu. Susu, diperoleh di toko-toko di kota. Pada

has to behave politely towards his uncles, grandmothers of both mother's and father's side, expect if Ego's father's relatives is higher in social status than that of Ego's mother.
Towards his cousins Ego Behaves in accordance with the age. If they are yonger than Ego, he treats them as his younger brothers and sisters and if they are older than Ego, he treats them as his older brothers and sisters. Towards his parents in low Ego has to respect as he has to do towards his own perents. Ego has to respect his brothers and sisters in Law, due to rate of age. Towards closest friends Ego behaives freely. As a habit some people behave very freely as to make fun one another merely becaused of a verydeep friendly emotions.

If Ego walks successively with his father, parents in law or with persons to whom be has to pay respect, Ego has to walk behind them. When eating together, Ego must not start eating or stop eating before the others do. It is taboo for ego to reach something above the place where the more respected persons sit; in on emergency he has to ask permission first. When he passes behind the respected person, he has to say tabewalar or alan (Sasak language), sentabe (Bima language), do'do (Dompu language), tabe (Sumbawa language).

As a member of Sumbawa tribe or Bima tribe, Ego will never address a girl who is not his relative. If he does it, he will injure the honour of the girl's family - Lover class of the community will behave more respectfully to the higher layer, but the latter will behave contraily. The respect is manifested in attitudes and in composition of utteracces. However, there are also persons who manifest the respect only by intonation (for instance in Dompu region). The people of Sasak, Bali and Sumbawa in West Nusa Tenggara only know two types of languages, namely polite language and language. But this polite language only concerus certain things, such as personnal pronouns and adjectives.

Long time ago before the 20 th century, at the time when bravery and knightly attitudes became the criteria/value of courage of a person, mainly in the tribe of Sasak, one could not get married before he got magic power. Since early adulthod, he started to learn or to practice ascetism. And to test his special abilities, during dry season through rainy season, a peressean was executed. It was a people's game, striking one another with rattan sticks and using shield made of goat's leather. The game was held in the afternoon or at night under the moonlight. The more dangerous than peresean is tajep. The form of the performance is similer with peresean. But a square tin is put at the end of the rattan sticks as an instrument of performance. There is also a performance colled pelengkungan (spear game).

The more horrible than the three games is bekelopukan. This last performance is a type of duel using magical poweful keris (dagger) and sword. The fatal person is buried in the very place without much ado. This performance is quits horrible and is usually held past midnight.

The Dutch Colonila Rule prohibited this duel which was considered a criminality and if the performance was known they could be punished. However it could not be abolished immediately because it had been deeply rooted among the community. After inter-village war had successfully been abolished and modern arms was introduced, the traditional arms and magic incantation and magic power had lost their significance. The interest of the community in magic power changes to self defence of pencak-silat.

A village in West Nusa Tenggara is a legal entity. it can be said that territorial factor genealogical factor and religious factor make up the entity. Their unity in a village is not incidental. It is caused by a social life among them, but more than that is coused by spiritual unity. A village in West Nusa Tenggara is a territorial as well as genealogical entity which are in certain cases make up a compact unity. They feel being a unity because they live in the same region or the same descendancy or worship the same ancestors, in the same place of sacrifice, and are subject to the same law or adat istiadat (customs and tratidion).

Members of the community of a village in West Sumbawa are always of the same view in confronting any problem, following the same course in attitude and action in oversoming the siad problem. It means that the villagers concerned put village interest above individual interest. This way of life is also found in other villages troughout West Nusa Tenggara, mainly in the villages that have not been influenced yet by modern life and economy.

An originil villages in West Nusa Tenggara is groups of houses or groups of kampungs (dasan in Lombok), and its surrounding is bordered by hedges (in Sasak language : lambah). The surrounding land is village region to become the right of the villagers, the place to cultivate rice and to breed cattles. No outsider is allowed to enter without permission from the vollage administrator. In the middle of the village there is a mosque used to serve Friday's prayers and holiday's prayer or religious celebrations. Not far from that village but atill in the village environment/region, there is a pedewaan or parafu (Bima). it was a place to worship ancestors in pre-Island lamic age.

By the increase of population, some villagers individually or in group go out from the village and make a new encampment which is a satellite of the village and is still tied to and managed by the original village. Taht is

masa-masa paceklik, ada juga penduduk yang hidup hanya dengan makan ubi atau ketela maupun jagung. Gadung (tumbuh-tumbuhan melilit) setelah dibuang kulitnya lalu dipotong memanjang kecil-kecil sebesar lidi, setelah itu diremas dengan garam atau air laut. Setelah lemas, maka disiram dengan air tawar berkali-kali hingga bersih, lalu dijemur. Gadung yang sudah kering dikukus dan dijadikan pengganti nasi, atau ada juga yang diurap kelapa.

Sebelum Perang Dunia II, penduduk Nusa Tenggara Barat yang wanita rata-rata pandai menenun dan memintal. Syarat seseorang wanita baru boleh kawin antara lain bila sudah pandai memintal dan menenun. Kapas kebanyakan ditanam di ladang-ladang dan di sawah. Dari pekerjaan memetik kapas sampai menjadi kain dikerjakan oleh wanita.

Prosesnya : bila kapas sudah dipetik, dijemur, kotorannya dibuang. Setelah itu bijinya dibuang dengan cara tradisional yang disebut **golong**. Kapas yang sudah dibuang bijinya, dijemur dan dijarangkan seratnya dengan alat yang disebut **betuk** (bahasa Sasak). Betuk, suatu alat terbuat dari bambu yang diberi bertali. Dengan memetik talinya yang dikenakan pada kapas, kapasnya terkoyak-koyak menjadi jarang seratnya hingga mudah dipintal. Kapas yang sudah demikian lalu dibentuk merupakan batang-batang seperti lilin. Setelah itu baru dipintal oleh wanita pada siang atau malam hari. Benang yang sudah dipintal, ditukal kemudian diberi nasi supaya tidak berbulu. Benang-benang yang perlu diberi warna, diolesi warna sebelum diberi nasi. Cara-cara bertenun tergolong masih bersifat tradisional.

e. Sosial Budaya

Di Nusa Tenggara Barat (terutama di desa-desa) golongan berpunya atau hartawan di desa adalah tumpuan harapan masyarakat. Artinya tempat minta tolong dari segala kesukaran serta penderitaan lahir dan batin. Bila sifat tersebut dilanggar atau menghindari diri daripadanya, maka akan tersingkirlah orang berpunya itu dari masyarakat. Prestise atau harga dirinya tentulah akan jatuh. Kalau hanya semata-mata mengutamakan kekayaan atau kepentingan diri pribadi kemudian pada suatu ketika dia mengalami kemalangan, masyarakat akan menjauhinya. Di kalangan suku-bangsa Sasak, sifat tolong-menolong ini sangat terkenal, misalnya : **bedea** = minta padi/beras dengan membawa barang-barang kecil (kopi, gula atau garam) sebagai alas kata; **nempil** = membeli barang bukan harganya (lebih murah); dan **ngendeng** = meminta sesuatu (beras, padi jagung atau ubi) dari teman dengan cuma-cuma.

Adat hormat menghormati dalam pergaulan menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap terhadap kerabatnya yang satu dan bagaimana terhadap kerabatnya yang lain, dan pula bagaimana terhadap orang lain baik sahabat maupun bukan bahkan orang yang tidak dikenalnya sama sekali.

Andainya si Ego mewakili suku Sumbawa atau suku Bima maupun suku Sasak, maka terhadap anak-anaknya ia bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Sikap dan sopan santunnya seperti layaknya seorang bapak yang harus dicontoh. Sedangkan terhadap isterinya ia bertindak selaku pelindung. Isteri Ego harus berbahasa sopan kepada suaminya. Kalau makan harus mendahulukan Ego daripada dia dan anak-anaknya. Anak-anak dan isteri Ego terhadap bapaknya jauh lebih hormat dari pada terhadap ibunya. Kalau berbicara dengan ayahnya tabu memandang muka ayahnya, di samping sikapnya harus sopan. Begitu pula sikap si Ego terhadap paman-pamannya dan nenek-neneknya dari pihak ayah maupun pihak ibu, kecuali kelas kerabat ayah si Ego lebih tinggi dari kelas kerabat ibu si Ego.

Terhadap saudara-saudara sepupunya Ego bersikap menurut umur. Bila umurnya lebih kecil dari Ego diperlakukannya sebagai adiknya dan bila umurnya lebih tua maka Ego memperlakukan mereka sebagai kakak-kakaknya. Terhadap mertua-mertuanya, Ego harus berlaku hormat seperti sikapnya terhadap orang tuanya sendiri. Terhadap ipar-iparnya Ego saling hormat menghormati, sesuai dengan tingkat umur. Terhadap sahabat kenalan yang sangat akrab Ego bersikap bebas. Bahkan ada kebiasaan beberapa orang sikapnya sangat bebas, seperti saling caci hanya semata-mata karena gembira.

Kalau Ego berjalan beriringan dengan ayahnya, mertuanya atau dengan orang yang lebih dihormati, Ego harus berjalan di belakang. Waktu makan bersama, waktu mulai dan berhenti tidak boleh mendahului. Ego tabu menjangkau sesuatu di atas tempat duduk orang-orang yang dihormatinya; kalau terpaksa harus dengan ijin lebih dahulu. Waktu meliwati belakang orang-orang yang dihormati, Ego harus mengatakan **tabe walar** atau **alan** (bahasa Sasak), **sentabe** (bahasa Bima), **do'do** (Dompu) **tabe** (bahasa Sumbawa).

Bila sebagai seorang suku Sumbawa atau suku Bima, Ego pantang menegur gadis yang bukan kenalan. Andai dilakukan, akan sangat menyinggung keluarga sang gadis. Lapisan masyarakat yang lebih rendah tingkatnya, akan bersikap lebih hormat kepada masyarakat yang lebih

wahy some villages in West Nusa Tenggara consist of some kampungs or dusuns. Rural household covers all outstanding things which pass the family and living place. Relationship among individuals is very close. Unity and solidarity among individuals are illustrated in mutual work which is executed cooperatively.

If an individual is regarded to break the custom and tradition arising a tense situation in the society, so the person who is responsible for the restoration of order is Head of the Village, or elderly people who are regarded to have power/ability in the community. The method is to punish the culprit; and if he doesn't confess, he can be sworn or, as in Lombok, is often ordered to drink land water which is considered to be sacred (such as : sacred-grave, land of drainage in the ricefield etc.).

It can be concluded that the community in West Nusa Tenggara live together to be united by ties of descludancy, religion, custom and tradition or livelihood.

Because of the ties, a sense of unity grows among them, mutual aid, etc. The custom of besesiru in Lombok, weharian in Bima, besesiru in West Sumbawa prove the mutual aid, to cultivate the dry-field, to build houses, to make irrigation, to plant rice, etc. When the people who have helped others are confrontted with big works, other people will help their inturn. The basis of mutual aid is the feeling of mutual need existing among the community.

A person who has been assisted by the community members but later does not want to assist the people who heve assisted him, usually he will be shunned and scorned by others. And if he ever needs people to assist him, it is difficult for him to get persons to be prepared to help him; even he is often isolated from the community.

The system of donation to oblige others to pay in return is a principle of social life in West Nusa Tenggara. It case of marriage or funeral or any other occasion, neighours and fellows come to give donation.

Without asistance of his fellowmen, a villager can not fulfill his needs. Because every aid given to fellowmen is counted accurately and if anyone needs aid from others but he can not obtain it from the expected person he will become disappointed and annoyed. Then he will tell his disappointment and annoyance to every one who symphatizes with him. A number of the community who does not show gratitude will recieve antiphaty from all members of the community. However, there is a type of aid given voluntarily such as aid for sick person and aid given to the family of the dead person.

People of West Nusa Tenggara Barat apprecite courage, honesty (satyang wacana) and value of one's donation. If there is a person of that quality generally he will be appointed leader.

According to Kuncaraningrat, such a person has characteristics as follows :

a. characteristics desired by the people;
b. characteristics in paralell with aspirations of the people and followed by them;
c. expertise recognized by the community;
d. characteristics manifest by physical strength which was generally shown by violence;
e. characteristics in paralell with social norms; and
f. owning indications of formal leader determined by custom;

A leader who has courage recognized by the people was called pepadu in Lombok of ancient time. Now a social leader is Tuan Guru, person who has expertise recognized by social members.

Tuan Guru in Lombok island as well as in Sumbawa island, has influence or authority and popularity exceeding those of formal leaders. Many people are obedient because they are convinced that he is the person who knows much about religious problems. The community regards Tuan Guru as a person who has characteristics due to norms and sacred values. A remote community in Lombok island recognizes Kyai and guardian as a social leader because they have much more knowledge than the public concerning religion and custom and tradition. In semi animistic community, a person recognized as leader is toa'loka (elderly person) in Lombok, oicuhi in Donggo (Bima), loka' in West Sumbawa. Characters of a leader in accordance withcustom give him prestige and authority as the figure to lead people. He is a son or relative of the former leader ; that gives him the opportunity to become a new leader ; however as symbols of authority he usually needs objects of heritage (such as Al Qur'an, old book, palm leaves of ceremony, or instruments of ceremony and miscellany) which are respected by most people. During the Dutch colonial time in Lombok, almost ech village found a recognized and respected leader, because he was expert in custom and tradition as well as requisites that had been stated. And also a powerful leader often emerged because he had expertise and knowledge. He was generally called Guru and respected like kings that made the government worried at that time. If the situation had reached thus, they were arrested and exiled out of the region.

As is usual in farmers society, population of West Nusa Tenggara were closely committeed to the region and community. They are fanatics in religion

tinggi, tetapi yang terakhir bersikap sebaliknya. Penghormatan itu selain dinyatakan dengan sikap juga dengan susunan kata-kata. Tetapi ada juga yang menyatakan rasa hormat itu hanya dengan lagu kata (misalnya di daerah Dompu). Orang-orang Sasak, Bali dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat hanya mengenal dua tingkat bahasa-bahasa halus dan bahasa biasa (kasar). Tetapi bahasa halus ini hanya mengenai yang tertentu saja, misalnya kebanyakan yang berkisar mengenai kata diri kata sifat.

Dahulu sebelum abad ke 20, semasa keberanian dan kesatriaan menjadi ukuran/nilai kelakian seseorang, terutama di kalangan suku Sasak, sebelum mendapat ilmu kejayaan tidak boleh kawin. Sejak umur akil baliqh ia mulai berguru atau bertapa. Dan untuk menguji keterampilan dan ilmunya sepanjang musim kemarau sampai musim hujan diadakan peresean. Yakni sejenis permainan rakyat, pukul-memukul dengan rotan dan memakai perisai kulit kambing. Mengadakannya sore hari atau malam hari sewaktu terang bulan. Lebih hebat dari peresean ialah tajeb. Bentuk permainannya sama dengan peresean. Hanya rotan yang dijadikan alat ditaruhkan timah segi empat pada ujung rotan. Ada pula permainan yang disebut **pelengkungan** (permainan tombak).

Yang lebih seram dari ketiga permainan itu ialah bekelopukan. Permainan yang terakhir ini adalah sejenis perang tanding dengan senjata tajam keris dan pedang yang bertuah. Yang mati dikubur diam-diam ditempat itu juga. Permainan ini mengerikan dan diadakan setelah larut malam.

Sejak Pemerintahan Belanda melarang permainan ini yang dinilai identik dengan kejahatan, dan jika ketahuan mereka dapat dituntut. Namun demikian tidak dapat dihilangkan seketika, karena sudah terlanjur menjadi kegemaran masyarakat. Setelah perang antar desa berhasil ditiadakan dan persenjataan modern mulai berkembang, persenjataan tradisionil beserta mantera dan ilmu kejayaan menjadi tidak berarti. Minat masyarakat kepada ilmu kejayaan beralih ke pencak silat.

Desa di Nusa Tenggara Barat merupakan persekutuan hukum. Dapat dikatakan bahwa yang mengikat daerah menjadi kesatuan adalah faktor teritoral, genealogis dan faktor religius. Persekutuan mereka di desa, tidaklah secara kebetulan karena adanya pergaulan antar mereka, tetapi lebih dari itu adalah bersifat kerohanian. Desa-desa di Nusa Tenggara Barat merupakan persekutuan teritorial maupun genealogis yang dalam hal-hal tertentu mewakili satu kesatuan. Mereka terasa terikat dalam satu kesatuan karena tinggal di daerah yang sama atau turunan yang sama, atau memuja leluhur yang sama di tempat pemujaan yang sama, dan tunduk pada hukum atau adat istiadat yang sama.

Anggota masyarakat dalam desa di Sumbawa Barat misalnya, dalam menghadapi sesuatu persoalan selalu sepaham, sehaluan dalam mengambil sikap dan tindakan dalam mengatasi persoalan tersebut. Semua itu berarti orang-orang desa yang bersangkutan lebih mengutamakan kepentingan desa daripada kepentingan diri sendiri. Cara hidup seperti ini terdapat juga di desa-desa lain di seluruh Nusa Tenggara Barat, terutama sekali di desa-desa yang belum banyak dipengaruhi oleh kehidupan dan ekonomi modern.

Desa-desa murni di Nusa Tenggara Barat, merupakan kelompok-kelompok rumah atau kelompok-kelompok kampung (dasan di Lombok), yang sekelilingnya dibatasi dengan pagar hidup (bahasa Sasak: lambah). Tanah sekelilingnya merupakan wilayah desa yang menjadi hak orang-orang desa, tempat mereka bersawah, berladang dan mengembala ternak. Tak seorang luarpun yang dapat masuk tanpa ijin penguasa desa. Di tengah-tengah desa terdapat mesjid yang dipergunakan mereka berjum'at dan sholat hari raya atau perayaan-perayaan yang berhubungan dengan agama. Atau jauh dari desa itu, tetapi masih di dalam lingkungan/wilayah desa tersebut terdapat pedewaan atau PARAFU (Bima) bekas tempat pemujaan leluhur di zaman sebelum Islam.

Karena pertambahan penduduk, beberapa orang desa secara perseorangan atau kelompok keluar dari desa membuat perkampungan baru yang merupakan desa anak yang masih terikat dan tunduk kepada desa induk. Inilah yang menyebabkan beberapa desa di Nusa Tenggara Barat terdiri dari beberapa kampung atau dusun. Rumah tangga desa meliputi segala sesuatu yang menonjol melintasi keluarga dan tempat tinggal. Hubungan antara individu di dalam desa erat sekali. Rasa persatuan dan solidaritas antara tiap individu tergambar di dalam pekerjaan bersama yang dilaksanakan secara gotong royong.

Kalau ada perbuatan individu yang dianggap melanggar adat-istiadat sehingga timbul ketegangan dalam masyarakat, maka yang bertindak untuk mengembalikan ketentraman masyarakat ialah Kepala desa. Atau orang-orang tua atau orang yang dianggap punya kekuasaan/kemampuan di dalam masyarakat. Caranya dengan jalan mengalahkan yang melanggar adat dan kalau tidak mengaku, dapat disumpah atau di Lom-

and custom. Nevertheless, they were not closed at all upon outside influence. Behind their hospitality, they behave carefully against outside influence. They do not just accept all things originating from outside, but they select and test them. Aspects that are considered not in contradiction with the belief and custom and tradition are absorbed and regarded their own prosperity. Such attitudes at the begining hampered the progress very much. Many of them before World War II avoided their children going to school, because they regarded that school disrupted the custom. While adat offence for them is very taboo. Not only it will arise shock in the community, but also will deteriorate relation between them and their ancestors; and it also means a shock of relation between them and the universe.

But is is usual that in this world there is not any community that all its members abey the custom. Those who deviate from the habit will become the begining and changes of community and culture. At the time of colonialization they were teachers and safeguards of the government. They become promoters and pioneers the longer the time the more many the followers. Besides that government also blessed them. Town community is the earliest who receive changes, surrounding community of government centre.

After the World War II, the knowledge of writing and reading progressed better than the knowledge of custom and tradition, because it can solve problems of life and living. That causes elderly persons to realize and to let their children go to primary schools up to Higher Learning.

2. Resources.

a. Potential of Agriculture

Potential of agriculture in the wide sense covers foodstuffs cultivation, cattle breeding, fishery, plantation, and forestry. Effort of intensification and diversification are still able to be executed. Besides that effort of extension is still able to be executed considering the unexlpoited wide grassland (250,346 Ha) to make new rice fields, development of catle breeding and plantation. Potential areas cover Nangamira (22,000 Ha), Kempo (13,000 Ha), Sumbawa Besar (31,000 Ha), Pelampang (41,300 Ha), Taliwang (12,030 Ha), Parade and Nawali (16,500 Ha) etc.

Besides land potential there is also maritime potential in a large scale. The territorial waters of West Nusa Tenggara is ± 29,870 Km2 with 101 of big and small islands, having the potential of fisheries in a large scale. Types of small fish / sea-products obtained in NTB territorial waters are cattle fish, shrimp, pear oyster, sea weed and miscellany. The potential fishpond and salt making are relatively large scale (8000 Ha) such as in South Lombok (Kutasuranang, Meruak), Plampang and Lape/lorok (in Sumbawa), Kempo and Mbawi (in Dompu), Sampan Solo, Bolo in Bima etc.

b. Potential of Mining

Based on the series of priliminary surveys executed, it is known that West Nusa Tenggara is rich in mineral deposits. The Mineral deposits are as follows :

a) Limestones in Sekotong, Mangkung, West Sumbawa, Bima and Dompu. The limestone is good quality for basic material of cement etc, with potential of hundreds of millionstons.

b) Clay in Lombok (from west to east), Moyo Hilir, Plampang, Sub District of Dompu, Rasanae and Woha, good quality for basic material of cement, bricks/tiles and other large scale potentials.

c) Pumicestones in Nothern part of West Lombok, nothern part of Central Lombok, Nothern and eastern part of East Lombok, with potential of hundreds of millions cubic meter.

d) Kaolin in Batuampar, Sari and Boke (Sape), for basic material of cement industry (white), caramics, paper and others large scale potentials.

e) Gypsum in Puyut, Daha (HUU) and Sape for Industrial materials of cement, drugs, cosmetics etc.

f) Iron-sand in east-coast of East Lombok island; Teluk Awang (Puyut), Sub District of Sape and Wera in Bima for basic material and quality are not yet determined.

g) Perlit and Sape (Bima), large-scale potential; further research is needed;

h) Building materials (stones, sand, gravel) in Lombok and in Sumbawa island; large-scale potentials for foundation of establishment of building, roods and miscellany.

i) Manganese in Konta, Narado, Tambe (Bima) is large scale potential,

j) Lead in Sukadana and Pajero (Lombok) and Dompu; relatively potential,

k) Geothermal in Dompu.

c. Industrial Potential.

West Nusa Tenggara region has various specific and potential industries/ home industries. They are follows:

bok sering dilaksanakan dengan diminumkan air tanah yang dianggap keramat (seperti misalnya : kuburan keramat, tanah saluran air di sawah, dan sebagainya) pada orang yang dianggap melanggar.

Kalau kita simpulkan, masyarakat di Nusa Tenggara Barat hidup bersama-sama disatukan oleh karena adanya ikatan keturunan, keagamaan, adat istiadat atau mata pencaharian. Karena ikatan-ikatan itu, timbul rasa persatuan yang erat antar mereka, sifat gotong royong dan sebagainya. Adat **bersiru** di Lombok, **weharima** di Bima, **besesiru** di Sumbawa Barat membuktikan sifat gotong-royong itu. Membuka huma, mendirikan rumah, membuat bendungan, menanam padi sering dilakukan secara gotong-royong oleh penduduk. Kelak bila si penolong menghadapi pekerjaan akan mendapat giliran untuk ditolong. Dasar dari tolong menolong adalah perasaan saling butuh membutuhkan, yang ada dalam jiwa masyarakat.

Seseorang yang pernah mendapat pertolongan dari warga masyarakat, tetapi kemudian tidak mau menolong orang yang pernah menolongnya, biasanya menjadi pembicaraan dan cemoohan orang lain. Dan bila kemudian hari ia memerlukan pertolongan lagi, maka ia sangat sulit mendapatkan tenaga, bahkan sering kali ia menjadi terasing di dalam masyarakat. Sistem menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas budi, merupakan suatu prinsip dari kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Bila ada orang kawin atau mati dan pesta-pesta lain, tetangga dan sahabat kenalannya datang membawa sumbangan-sumbangan.

Tanpa bantuan sesamanya, orang-orang di desa tidak dapat memenuhi keperluannya. Sehingga mungkin karena kelihatannya seolah-olah setiap orang memperhitungkan dengan tajam bantuan yang pernah diberikan kepada sesamanya. Dan bila pada waktu ia memerlukan pertolongan, pertolongan itu tidak datang dari orang yang diharapkannya maka ia menjadi kecewa dan jengkel. Hal itu akan dibicarakannya atau diceritakannya kepada setiap orang yang biasa menaruh simpati kepadanya. Anggota masyarakat yang tidak tahu membalas budi itu akan menerima antipati dari semua warga masyarakat. Tetapi ada juga jenis pertolongan yang memang benar-benar diberikan secara sukarela seperti pertolongan pada orang sakit dan pertolongan yang diberikan pada waktu ada kematian.

Orang-orang Nusa Tenggara Barat sangat menghargai keberanian, kejujuran (satyeng wacana) dan kebesaran dharma seseorang. Bila di dalam masyarakat terdapat orang yang demikian, biasanya diangkat menjadi pimpinan. Hal itu menurut Kuncaraningrat tidak lain oleh karena orang yang demikian memiliki sifat-sifat yang terpenting di antaranya :

a sifat-sifat yang disenangi warga masyarakat umumnya;
b sifat-sifat yang menjadi cita-cita banyak warga masyarakat dan yang suka ditiru;
c keahlian yang diakui oleh masyarakat;
d sifat-sifat yang diwujudkan oleh kekuatan fisik, yang biasanya dapat ditunjukkan dengan tindak kekerasan;
e sifat-sifat yang sesuai dengan norma-norma masyarakat; dan
f memiliki lembaga-lembaga pimpinan resmi yang ditentukan oleh adat.

Pimpinan yang mempunyai keberanian yang diakui oleh warga masyarakat adalah seperti pepadu di Lombok di zaman dulu. Sekarang pimpinan masyarakat adalah Tuan Guru, yakni mempunyai keahlian yang diakui oleh warga masyarakat. Tuan Guru di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa, pengaruh atau wibawanya dan popularitasnya melebihi pimpinan yang resmi (formal leader). Orang banyak taat karena percaya bahwa dialah yang tahu tentang masalah dan seluk beluk agama. Masyarakat menganggap Tuan Guru adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianggap keramat oleh masyarakat. Di masyarakat yang masih terpencil di Pulau Lombok, mengakui Kyai dan pemangku sebagai pimpinan masyarakat karena pengetahuannya yang lebih dari orang-orang awam tentang agama dan adat istiadat. Dalam masyarakat yang setengah animis, yang diakui sebagai pimpinan masyarakat ialah **toa'loka** (orang tua) di Lombok, ncuhi di Donggo (Bima), **loka'** di Sumbawa Barat.

Tanda-tanda pimpinan yang menurut adat itu memberi gengsi dan kewibawaan kepada seorang tokoh yang memimpin. Ia adalah putera atau kerabat dari pimpinan yang lama, hal mana memberikannya peluang untuk menjadi pimpinan; akan tetapi sebagai tanda-tanda kewibawaan ia biasanya memerlukan benda-benda pusaka (seperti Al Qur'an, kitab kuno, lontar-lontar upacara atau alat-alat upacara dan lain-lain) yang dipandang dan dihormati oleh sebagian besar warga masyarakat. Pada zaman Hindia Belanda di Lombok hampir di setiap desa terdapat pimpinan yang diakui dan dihormati masyarakat. Karena keahliannya dalam masalah adat-istiadat dan memiliki syarat-syarat seperti telah disebutkan tadi. Juga sering timbul pimpinan kharisma karena ilmu dan keahliannya yang biasa disebut Guru dan kemudian

a) Regional specific Woven-products (in Sukarara, Karuak, etc.)
b) Plait of screw-pine, bamboo (Loyok, Sintung, Suradadi)
c) Home Industry of bamboo/rattan (Taliwang, Janapria, etc.)
d) Carving (West Lombok);
e) Tiles (Kumbung, Abiantubuh etc);
f) Lime (Kangkung, Tanjungkarang etc);
g) Salt-making, potentials of ± 8.000 Ha (in Bolo Woha, Lape-Lopok, South Lombok/Kute, Sereneng, Jaro Waru);
h) Besides that potentials of agricultural products are in a large scale such as coconut plants (sizes 54,007 Ha)

d. Trade Potential.

Trade potential mainly agricultural products in West Nusa Tenggara is large scale.

An illustration can be given as follows :

a) Plantation, such as coconut, 54,007.73 Ha where 25,059.57 Ha (± 46%) are younger plants (not yet productive); besides, potential for expansion is large scale; every year there is expansion and rejuvenation.
b) Cattle breeding mainly included buffalo and cows, and pultry (eggs); Especially for cattle-breeding, seed-breeds have been distributed (at least 1,000 cows every year executing AI (insimination) and PUTP;
c) Forestry is mainly Duabanga Kulocana Wood (exported)
d) Fishery, such as cuttle fish, nener young fish of bandeng), sea weed.
e) Foodstuff agriculture, such as soy bean, garlic, onion and Gaplek (dried cassava);

e. Tourism Potential

West Nusa Tenggara has a large-scale potential of tourism development, such as :

a) Natural sceneries such as in Batu Bolong, Sire, Kute, Tetu Batu etc ;
b) Historical relics such as Mayura, Narmada Park, Sumbawa Palace, Bima Palace, and so on;
c) Arts such as Oncer, Peresean, Langgo, Mouyeh, and home industry such as purbasari woven products, carvings etc.
d) Strategic geographic location, namely between islands of Bali and Komodo.

f. Labour Force Potential.

Work-age group in 1976 numbered 1,771,847 persons and labour-force numbered by 893,150 persons. The figures respectively became 1,818,971 persona and 902,946 persona in 1980.

3. Social-economic Condition.

Since 1969 Regional product calculation had been executed three times in form of PDRB (Produk Domestik Regional Bruto = Gross Regional Domestic Products) of West Nusa Tenggara Province ; respectively for the period of 1969-1971, 1972-1975, and 1976-1978. Calculation of PDRB for the period of 1969-1971 was based on constant market prices of 1969, while calculation of PDRB for the period of 1971-1975 and 1976-1978 was based on constant market prices of 1973.

In 1972 in accordance with findings of the Regional Income Research Team of Economics Faculty of UNRAM, the PDRB of NTB Region was estimated at Rp 34,270.74 millions while at the end of Pelita II (1978) the PDRB of NTB bcame Rp 215, 290.16 millions, based on current market prices. So, for the period of 1972 up to 1978, NTB Regional PDRB increased by 628.2% while for the period of Pelita II increased by 373.58%. If the increase was observed per annum, during the period of 1972-1978 PDRB of NTB Region increased averagely by 38.01% and for the period of Pelita II by 34.81%.

However this increase was not areal figure, because it still contained the inflation value or price increase, so it just shaw a nominal value. To know the development of real PDRD of NTB Region, the PDRB figure should be based on constant market prices (of 1973).

The period of 1972-1978 showed an increase by 9.78% and if it was observed during Pelita II, the development figure reached averagely by 6.54% per annum.

The rate of economic growth of NTB Region since 1972 up to 1978 was 10.66 % per annum. While in Pelita II it reached 8.12 %. It means That the rate of economic growth in West Nusa Tenggara region is higher than the national average.

PDRB of NTB region during the second year or Pelita II only increased by 2.31 % per annum. Compared with the first year. Afterwards, in the third year it increased by 6.66 % when compared with the second year, the fourth year increased by 8.49 % when compared with the third year and

dihormati seperti raja-raja yang menggelisahkan pemerintah waktu itu. Kalau sudah demikian mereka ditangkap dan dibuang keluar daerah.

Seperti lazimnya masyarakat petani, penduduk Nusa Tenggara Barat sangat terikat oleh daerah dan masyarakatnya. Mereka fanatik agama dan fanatik adat. Namun demikian mereka tidak menutup diri sama sekali dari pengaruh dunia luar. Hanya di balik sikapnya yang ramah tamah, mereka bersikap hati-hati dalam menerima pengaruh luar. Segala yang berasal dari luar tidak diterima mereka begitu saja, tetapi disaring dan diuji. Bagi unsur-unsur yang tidak melanggar atau bertentangan dengan kepercayaan dan adat istiadat mereka serap serta dianggap miliknya sendiri. Sikap mereka yang demikian pada mulanya sangat menghambat kemajuan. Banyak di antara mereka sebelumnya Perang Dunia II menghambat anak-anak mereka bersekolah, karena sekolah mereka anggap perusak adat. Sedangkan pelanggaran adat bagi mereka sangat tabu. Bukan saja akan menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat, tetapi juga akan merusak hubungan mereka dengan nenek moyang atau leluhur mereka; dan ini berarti juga kegoncangan hubungan mereka dengan alam semesta (macrokosmos).

Tetapi adalah lazim bahwa di dunia ini tidak ada suatu masyarakat yang seluruh anggotanya taat kepada adat. Mereka yang menyimpang dari kebiasaan itulah yang menjadi pangkal dan perobahan masyarakat dan kebudayaan. Pada masa penjajahan mereka itu adalah guru-guru dan pengawal-pengawal pemerintah. Mereka menjadi penganjur dan pelopor yang makin lama makin banyak pengikutnya. Disamping itu Pemerintah merestuinya pula. Maka yang paling dulu menerima perobahan-perobahan itu adalah masyarakat kota, masyarakat sekeliling pusat pemerintahan.

Setelah Perang Dunia ke II, kenyataan pengetahuan tulis baca lebih unggul dari pada pengetahuan adat istiadat, karena dapat mudah memecahkan masalah hidup dan kehidupan. Kesadaran itu menyebabkan orang-orang tua sadar dan membiarkan anak-anak mereka memasuki sekolah-sekolah rendah sampai perguruan tinggi.

2. Sumberdaya

a. *Potensi Pertanian*

Potensi pertanian dalam arti luas meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan cukup besar. Usaha intensifikasi dan diversifikasi masih dapat diperlukan. Disamping itu usaha ekstensifikasipun masih dapat dilakukan mengingat masih luasnya areal padang rumput yang belum dimanfaatkan (250.348 Ha), memungkinkan untuk pencetakan sawah baru, pengembangan peternakan dan perkebunan. Daerah-daerah potensial meliputi Nangamiro (22.000 Ha), Kempo (13.000 Ha), Sumbawa Besar (54.000 Ha), Pelampang (41.300 Ha) Taliwang (22.350 Ha), Parade dan Nawali (16.500 Ha), Bajo (6.800 Ha), Blanting dan Amor-amor (6.200 Ha) dan lain-lain. Selain potensi daratan maka potensi lautan cukup besar. Luas perairan Nusa Tenggara Barat ± 29.870 Km2 dengan ± 101 pulau besar dan kecil, memiliki potensi perikanan cukup besar. Jenis-jenis ikan/hasil laut yang terdapat di perairan NTB antara lain cumi-cumi, kembung, cakalang, tenggiri, teri, udang, mutiara, rumput laut dan lain-lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah potensi pertambakan dan penggaraman cukup besar (8.000 Ha) seperti di Lombok Selatan (Kuta. Saranang, Karuak), Plampang dan Lape/Lopok (di Sumbawa), Kempo dan Mbawi (di Dompu), Sapam Belo dan Bolo di Bima dan lain-lain.

b. *Potensi Pertambangan*

Berdasarkan serangkaian survey pendahuluan yang telah dilakukan di ketahui bahwa alam Nusa Tenggara Barat cukup kaya dengan bahan-bahan galian.

Bahan-bahan galian tersebut antara lain :

a Batu gamping di Sekotong, Mangkung, Sumbawa Barat, Bima dan Dompu.

Bermutu cukup baik untuk bahan baku semen dan lain-lain, potensi ratusan juta ton.

b Tanah liat di Lombok (dari barat sampai ke timur), Moyo Hilir, Plampang, Kecamatan Dompu, Rasanae dan Woha, bermutu baik untuk bahan baku semen, bata/genteng dan lain-lain yang potensinya besar.

c Batu apong di Lombok Barat bagian utara, Lombok Tengah bagian utara dan Lombok timur bagian utara dan timur, potensinya ratusan juta meter kubik.

d Koalin di Batunampar, Sari dan Boke (Sapo). Untuk bahan baku industri semen (putih) keramik formasi, kertas, dan lain-lain potensinya cukup besar.

e Cips di Pujut, Daha (HUU) dan Sape. Untuk bahan-bahan industri semen obat-obatan kosmetik dan lain-lain.

f Pasir besi di pantai timur pulau Lombok Timur, Teluk Awang (Pujut), Kecamatan Sape dan Wera di Bima. Untuk bahan baku semen,

at the cut of Pelita II increased by 9.29 %, so that during Pelita II PDRB of West Nusa Tenggara averagely increased by 6.54 % per annum. The growth was real because PDRB figure mentioned was based on constant market prices of 1973. If the nom nal value was viewed (PDRB based on curent market prices), the illustration is as follows : During the second year of Pelita II PDRB increased by 16.81 % compared with the first year and then became 79.04 % during the third year, then decreased to 19.66 % during the fourth year and at the end of Pelita II became 23.74 %, so that during Pelita II it averagely increased by 34,81 % per annum. (See Table I - 4 and I - 5)

The socio-economic improvament of NTB commonity can bee seen from the role of grouth of income per kapita whish contineeally incuases. While at the end of Pelita II the income per capita based on constant market prices of 1973 was Rp.31,967 or Rp.82,952. 20 based on carent market prices, during 1980 it increased to Rp.34,329.38 based on constant market prices or Rp.111,527.16 based on carrent market prices. It further increased in 1981 to Rp.36,059.96 based on constant market used of 1973 and on current market prices was higher than previous years. (See Table I - 6).

Activity of development which contributes substantially upon the rate of income or socio-economic condition in general is the success of the gogorancah rice intensification programme which has been executed since 1980/1981.

Besides improvement in economic field, fast progress also been recarded in socio-cultural rield.

4. The History of Government

West Nusa Tenggara Province was established based on Law No : 64 of 1958. There were two priods of Aminstrative government before this Province existed. First, prior to the promulgation of Law No : 1 of 1957 West Nusa Tenggara belonged to the Lesser Sunda Island Group in the teritory of East Indonesia State (Law No 1 of 1950) At that time the Lesser Sunda Island Group was one of the provinces of the Unitary Republic of Indonesia based on 1945 Constitution, by its law of institution, i.e. State Legislation of the Dutch Colonial Government in Indonesia (State Gazette Stb.143 of 1946) comprising Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Solor, Alor, Sauu, Roti and Timor islands. Later on it was instituted as on archipelago whose administration consisted of Head of local Government and King's Council. This region was known as Daerah Swatantra (Autonomous Government). Then as the Law No 4 of 1950 came into effect, automatically the region became self governing. West Nusa Tenggara area at that time comprised two Local/Regional Administrations i.e. Lombok Island and Sumbawa Island.

Based on Law No 1 of 1957, in West Nusa Tenggara Province a State Committee was established with the mission to draw up the structure of the Regional Government. Based on the work of the Committee, the Minister of Home Affairs submitted a Bill on First-level and Second-level Daerah Swatantra to the House of Representatives (Parliament) which was approved on August 14, 1958 covering Daerah Swatantra of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara, and Law No 69 of 1958 concerning Second Level Daerah Swatantra for the said three regions.

Officially, the Laws No 64 of 1958 and No 69 of 1958 became effective for NTB First Level Daerah Swatantra after the issuance of Decree of the Minister of Home Affairs dated October 29, 1958 No Up 5/6/21 which promoted R AR Moch Roeslan Tjakraningrat as acting Head of First Level Daerah Swatantra for West Nusa Tenggara (NTB).

The ex Regional Heads of Lombok Island and Sumbawa Island were promoted as acting assistants of Head of First-Level Daerah Swatantra based on the Decree of the Minister of Home Affairs dated October 29, 1958 No Up 7/14/34. On the execution of one of his tasks, the Head of the First-Level Daerah Swatantra of West Nusa Tenggara liquidated Lombok and Sumbawa Administration (each dated December 17 th, 1958 and January 22, 1959). And based on the liquidation it was decided that December 17 th, 1958 as the birth of West Nusa Tenggara Province.

In the period after the enactment of Law No 64 of 1958 and No 69 of 1958, all administrative matters were transferred to First level Daerah Swatantra from the former Island Administration and in the longrun to second-level Daerah Swatantra.

The structure of organization concerning second-level Daerah Swatantra began which the promotion of and acting Regional Head (Based on Decree of the Minister of Home Affairs dated October 29, 1958 No Up 7/14/34) as follows :

- *JB Tuhumena Maspaitela for Daswati II of West Lombok*
- *Lalu Mahnep for Daswati II of Central Lombok*
- *Idris HM Djafar for Daswati II of East Lombok*
- *H. Kaharuddin for Daswati II of Sumbawa*
- *MT Siradjuddin for Daswati II of Dompu*
- *Djunaidi Amir Hamzah for Daswati II of Bima*

For the supplment of the Regional Government, the Regional House of Representatives of West Nusa Tenggara Province was established on July

baja dan lain-lain, potensi dan mutu belum dapat ditentukan.

g Perlit dan Sape (Bima) potensinya besar, perlu penelitian lebih lanjut.

h Bahan bangunan (batu beku, pasir, kerikil) di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa, potensi besar untuk pondasi bangunan gedung, jalan dan lain-lain.

i Mangaan di Monta, Parado, Tente (Bima), potensinya besar.

j Timah hitam di Sukadana dan Pajero (Lombok), dan Dompu yang cukup potensial.

k Sumber panas bumi (geotermal) di Dompu.

c. *Potensi Perindustrian*

Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki banyak sekali industri/kerajinan rakyat yang spesifik dan potensinya cukup besar. Antara lain sebagai berikut :

a Tenunan khas daerah (di Sukarara, Karuak dan lain-lain).

b Anyam-anyam pandan, bambu (Loyok, Sintung, Suradadi).

c Kerajinan bambu/rotan (Taliwang, Janapria dan lain-lain).

d Ukir-ukiran (Lombok Barat).

e Bata genteng (Kumbung, Abian tubuh dan lain-lain).

f Kapur (Mangkung, Tanjung Karang dan lain-lain).

g Penggaraman rakyat, potensinya ± 8.000 Ha (di Bolo Woha, Lape-lopok, Lombok Selatan/Kute, Sereneng, Jaro Waru.

h Disamping itu potensi industri yang mengolah pertanian cukup besar seperti tanaman kelapa (seluas 54.007 Ha).

d *Potensi Perdagangan*

Potensi perdagangan terutama hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat cukup luas.

Sebagai gambaran dapat dilihat sebagai berikut :

a Perkebunan, seperti kelapa seluas 54.007,73 Ha diantaranya seluas 25.059,57 Ha (± 46%) adalah tanaman muda (belum menghasilkan), disamping itu potensi untuk perluasannya cukup besar, setiap tahun diadakan perluasan dan peremajaan.

b Peternakan, terutama ternak kerbau dan sapi serta unggas (telur). Khusus ternak sapi dikembangkan melalui usaha penyebaran sapi bibit (setiap tahun minimal 1.000 ekor), pelaksanaan AI (Kawin Suntik) serta PUTP.

c Kehutanan, terutama kayu Duabanga Mulocana (diekspor).

d Perikanan, seperti cumi-cumi, nener, rumput laut.

e Pertanian pangan, seperti kedelai, bawang putih, bawang merah serta gaplek.

e *Potensi Pariwisata*

Daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi yang cukup banyak untuk pengembangan pariwisata, potensi tersebut antara lain :

a Keindahan alam seperti di Batu Bolong, Sire, Kute, Tete Batu dan lain-lain.

b Peninggalan sejarah seperti Mayura, Taman Narmada, Istana Sumbawa, Istana Bima, dan lain-lain.

c Kekayaan seni seperti Oncer, Presean, Langgo Monyeh dan kerajinan rakyat seperti kain tenun purbasari, ukir-ukiran dan lain-lain.

d Letak geografis yang menguntungkan yakni terletak antara pulau Bali dan Pulau Komodo.

f *Potensi Tenaga Kerja*

Jumlah tenaga kerja tahun 1976 sebanyak 1.771.847 orang dengan angkatan kerja sebanyak 893.150 orang, masing-masing telah menjadi 1.818.971 orang dan 902.946 orang pada tahun 1980.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Sejak tahun 1969 sudah tiga kali diadakan perhitungan pendapatan Regional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat; masing-masing untuk periode tahun 1969 - 1971, periode tahun 1972-1975, dan periode tahun 1976-1978. Perhitungan PDRB untuk periode tahun 1969-1971 dilakukan atas dasar harga konstan tahun 1969, sedangkan perhitungan PDRB untuk periode tahun 1972-1975 dan tahun 1976-1978 dilakukan atas dasar harga konstan tahun 1973.

Pada tahun 1972 menurut perhitungan Team Peneliti Regional Bruto Income Fakultas Ekonomi UNRAM, diperkirakan PDRB Daerah NTB berjumlah ± 34.270,74 juta sedangkan pada Pelita II (tahun 1978) jumlah PDRB NTB menjadi Rp215.290,16 juta, berdasarkan harga berlaku. Dengan demikian selama periode 1972 s/d 1978, PDRB Daerah NTB meningkat sebesar 628,2% sedangkan kalau dilihat peningkatannya selama periode Pelita II angka peningkatannya sebesar 373,58%. Kalau angka peningkatan itu dilihat per tahun, maka selama periode tahun 1972-1978 PDRB Daerah NTB meningkat rata-rata 38,01% dan selama periode Pelita II meningkat rata-rata 34,81%. Namun angka peningkatan ini bukanlah peningkatan riil, karena di dalamnya masih mengandung nilai inflasi atau kenaikan harga, jadi hanya menunjuk-

6 th. 1959 and sworn in by the Minister of Home Affairs on November 4 th, 1959. On November 7 th, 1959 the Chairman and Vice Chairman of the Regional Parliament were elected, respectively Mr Madiloe ADT and Haji Achsyid Mudzhar. On November 9 th, 1939 The House by acclamation elected Mr R AR Moch Roeslan Tjakraningrat as Governor and then appointed by Presidential Decree No 468/XI/1959. December 24 th, 1959. (Sworn in on December 9 th, 1960). On April 8 th, 1960 with the issuance of the Minister Affairs No P.D.6/2/13-9 the formation of the Regional Government Council was in effect.

With the Decree of the Minister of Home Affairs dated September 23, 1966 No Up 12/3/46-1326, Governor Roeslan Tjakraningrat was replaced by HR Wasita Kusumah. And then by the Presidential Decree No : 48 of 1967 the Governor was sworn in as Governor of West Nusa Tenggara as from 16 April 1967.

For the second term Mr HR Wasita Kusumah was appointed as Governor based on Presidential Decree No 40/M 1975 dated March 28, 1973. (sworn in on April 16 th, 1973)

His second term onded on April 10 th, 1978 based on Presidential Decree No 67/M/1978. Following the Presidential Decree No 178/M/1978 Gatot Suherman was appointed as Governor West Nusa Tenggara Province First Level (sworn in by the Minister of Home Affairs on August 30, 1978)

In the year 1983, based on Presidential Decree No 182/M/1983 dated August 11, 1983, H Gatot Suherman was appointed as Governor for the second term and sworn in on August 30, 1983 for the period of 1983 - 1988.

5. General Elections

The distribution of votes of the 1977 General Elections is as given in Table I-7.

Meanwhile, the distribution of votes of the 1971 General Elections is as given in Table I-8.

The tables presented above show that PPP recorded some increase while Golkar a little setback. PDI won the same number of seats although the votes increased from 54,007 in 1971 to 65,294 in 1977.

The increase of PPP votes was due to a number of factors, including the use of Ka'bah (Islamic sacred shrine) drawing as symbol. The symbol was very influential among the West Nusa Tenggara community who are mostly Islam fanatics. This aspect was exploited by the PPP.

On the other hand, the potentials among the Golkar had not been consolidated intensively. Some members of the civil servants corps had had the liberty to go astray from the directives handed down by its central chairmanship.

By Decree of the President of the Republic of Indonesia No 25 of 1981, the General Elections of 1982 was undertaken on 4 May 1982. The polling stations throughout West Nusa Tenggara were crowded by people to give their votes according to the valid principles of LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia = Direct, Public, Free and Secretive).

The participants of the General Elections on provincial level in West Nusa Tenggara agreed that it had been carried out according to valid rules.

Results of the 1982 General Elections in West Nusa Tenggara can be summarized as follows:

a. Number of voters who used their voting rights was 1,401,986 people (96.41%) out of the 1,455,667 registered. (The percentage for 1977 General Elections was 96.01%.

b. The composition of seats won by each participant, in comparison with that of 1977, in the Provincial Parliament is as folows:

	General Elections 1982	*General Elections 1977*
PPP	*28.27%*	*36.76%*
Golkar	*68.54%*	*57.37%*
PDI	*3.19%*	*5.87%*

The seats won by each participant in the 1982 General Elections for the provincial parliament are as follows:

PPP	=	*9 seats (3 less than that in 1977)*
Golkar	=	*22 seets (4 more than that in 1977)*
PDI	=	*1 seat (1 less than that in 1977)*

kan nilai nominal saja. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Daerah NTB secara riil digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan tahun 1973.

Selama periode tahun 1972-1978 menunjukkan angka peningkatan rata-rata setahun sebesar 9,78%, dan kalau dilihat selama Pelita II angka perkembangan itu mencapai 6,54% rata-rata setahun.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi (the rate of economic growth) Daerah NTB sejak tahun 1972 sampai dengan 1978 rata-rata 10,66% setahun, sedangkan selama Pelita II pertumbuhan itu mencapai 8,12%.

Dengan angka-angka pertumbuhan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Daerah Nusa Tenggara Barat lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi rata-rata secara Nasional.

Kalau dilihat perkembangan PDRB Daerah NTB dari tahun ke tahun selama Pelita II, maka akan terlihat bahwa pada tahun ke dua Pelita II PDRB meningkat hanya 2,31% dibandingkan dengan tahun pertama, kemudian pada tahun ketiga meningkat 6,66% dibandingkan dengan tahun kedua, tahun keempat peningkatan itu mencapai 8,49% dibandingkan dengan tahun ketiga dan pada akhir Pelita II meningkat menjadi 9,29%, sehingga selama Pelita II PDRB daerah Nusa Tenggara Barat meningkat rata-rata 6,54% setahun. Perkembangan/pertumbuhan ini adalah riil karena angka PDRB dimaksud didasarkan atas dasar konstan tahun 1973. Sedangkan kalau dilihat perkembangan nilai nominalnya (PDRB atas dasar harga berlaku) maka gambarannya sebagai berikut. Pada tahun kedua Pelita II PDRB meningkat 16,81% dibandingkan dengan tahun pertama selanjutnya meningkat menjadi 79,04% pada tahun ketiga, kemudian menurun menjadi 19,66% pada tahun keempat dan akhir Pelita II meningkat lagi menjadi 23,74% sehingga selama Pelita II meningkat rata-rata 34,81% setahun. Lihat Tabel I-4 dan I-5.

1980/1981.

Disamping peningkatan pada bidang ekonomi, juga pada bidang sosial budaya mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan.

4 Sejarah Pemerintahan

Propinsi Daerah Tingkat I NTB terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 64 tahun 1958. Sebelum terbentuknya Propinsi Daerah Tingkat I NTB menurut Undang-Undang tersebut, dibedakan dalam dua periode masa pemerintahan. Pertama sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1957, Nusa Tenggara Barat termasuk dalam Gugusan Kepulauan Sunda Kecil Dalam wilayah Negara Indonesia Timur (Undang-Undang No 4 tahun 1950). Waktu itu Kepulauan Sunda Kecil merupakan salah satu Propinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Undang-Undang pembentukannya yaitu Lembaran Negara Pemerintah Pendudukan Belanda di Indonesia (stb. 143 tahun 1946) meliputi Pulau Bali, Lombok Sumbawa, Sumba, Flores, Solor, Alor, Sawu, Roti dan Timor. Kemudian dibentuk menjadi Daerah Pulau yang pemerintahannya terdiri dari Kepala Pemerintahan setempat dan Dewa Raja-Raja. Daerah tersebut lebih dikenal Daerah Swatantra. Dengan berlakunya Undang-Undang No 44 Tahun 1950 tersebut maka otomatis daerah tersebut menjadi daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah Nusa Tenggara Barat waktu itu meliputi dua wilayah Pemerintah Daerah yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Dengan berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1957, untuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara dibentuk suatu Panitia Negara dalam rangka menentukan bentuk dan susunan organisasi Pemerintah Wilayah. Atas hasil Panitia, Menteri Dalam Negeri mengajukan rancangan

Tabel / *Table I - 4*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1979 - 1983 (JUTAAN RUPIAH)

GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE BY FIELD OF ENTERPRISE BASED ON CURRENT MARKET PRICES 1979 - 1983 (JUTAAN RUPIAH/BY MILLIONS)

No	LAPANGAN USAHA *FIELD OF ENTERPRISE*	1979 *1979*	1980 *1980*	1981 *1981*	1982 *1982*	1983 *1983*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian/*Agriculture* :	136.906,2	164.192,4	197.069,6	232.750,0	279.447,6
	1.1 Tanaman Bahan makanan/*Food-crops cultivation*	99.170,4	112.724,5	136.078,0	166.824,3	189.666,7
	1.2 Tanaman Perkebunan Rakyat/*Paltation Estates*	13.692,3	14.564,9	20.581,6	18.192,6	19.800,2
	1.3 Peternakan/*Animal Husbandry*	13.377,6	22.093,9	23.767,0	27.438,7	41.417,2
	1.4 Kehutanan/*Forestry*	3.233,7	3.681,6	3.356,2	3.467,3	5.003,9
	1.5 Perikanan/*Fishery*	7.431,2	11.127,5	13.827,8	16.827,1	23.559,6
	Pertambangan & Energi/*Mining and Energy*					
1	Galian/*Mineral*	3.746,3	4.871,1	6.634,6	8.263,8	8.697,7
2	Industri/*Industry*	5.400,5	7.361,5	8.361,5	9.697,1	11.913,6
3	Listrik Gas & Air Minum/*Electricity, gas, tap water*	304,0	646,5	769,3	1.141,0	1.633,9
4	Bangunan/*Construction*	8.007,8	12.681,7	18.986,6	25.577,2	26.949,0
5	Perdagangan Hotel & Restoran/*Trade, Hotel, Restaurant*	39.890,1	42.993,2	54.586,3	63.293,1	74.022,1
6	Pengangkutan & Komunikasi/*Transportation aand Commenication*	18.081,2	21.295,8	24.975,6	31.877,6	36.288,8
7	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya/*Bank and Other Financial Intermediaries*	2.085,5	3.064,2	4.830,1	5.765,6	7.157,0
8	Sewa Rumah/*House Rent*	3.857,9	4.744,1	5.424,2	6.198,7	6.869,5
9	Pemerintah & Pertahanan/*Government and Defence*	19.921,9	27.470,7	37.263,8	46.845,8	55.096,1
10	Jasa-jasa/*Services*	8.927,9	10.706,6	13.127,9	15.248,7	17.347,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	247.128,3	299.837,2	372.029,5	446.658,6	525.422,4

Sumber : Kantor Statistik Propinsi NTB

Source : Office of Statistics NTB Province

Peningkatan sosial ekonomi masyarakat NTB yang telah dicapai selama ini antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat pendapatan perkapita penduduk yang terus meningkat. Jika pada akhir Pelita II pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan tahun 1973 adalah sebesar Rp31.967,- atau Rp82.952,20 atas harga berlaku, pada tahun 1980 meningkat menjadi Rp34.329,38 atas harga konstan atau Rp111.527,16 atas harga berlaku. Sedangkan pada tahun 1981 meningkat menjadi Rp36.059,96 atas harga konstan 1973 dan harga berlaku yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
Lihat Tabel I-6.

Diantara kegiatan pembangunan yang hasilnya cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan atau keadaan sosial ekonomi masyarakat umumnya, adalah keberhasilan pelaksanaan program intensifikasi pada gogorancah, yang telah dilaksanakan sejak tahun

Undang-Undang Daerah Swatantra Tingkat I dan Tingkat II ke DPR dan disahkan tanggal 14 Agustus 1958 menjadi Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 meliputi Daerah Swatantra Bali, NTB dan NTT dan Undang-Undang No 69 tahun 1958 untuk daerah Swatantra Tingkat II bagi ketiga Daerah tersebut.

Secara resmi Undang-Undang No 64 tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tersebut berlaku bagi Daerah Swatantra Tingkat I NTB, setelah keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1958 No Up.5/6/21 yang mengangkat R AR Moh Roeslan Tjakraningrat sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1958 No Up.7/14/34 mengangkat para bekas Kepala Daerah Pulau Lombok dan Sumbawa sebagai pembantu sementara Kepala Daerah Swatan-

Tabel / *Table I - 5*

PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA—ANGKA PERKAPITA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU & ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975, TAHUN 1979 - 1983

REGIONAL INCOME AND PER CAPITA FIGURES OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE BASED ON CURRENT MARKET PRICES AND CONSTANT MARKET PRICES OF 1975 (1979-1983)

No	PERINCIAN/*DETAIL*	1979	1980	1981	1982	1983
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Atas Dasar Harga Berlaku/*Based on current market Prices*					
1	PDRB atas dasar harga pasar (Jutaan rupiah) *PDRB based on current market prices (in million rupiahs)*	247.128,3	299.837,2	372.029,5	446.658,6	525.422,4
2	Penyusutan barang Modal (Jutaan rupiah) *Allowance of capital goods (in million rupiahs)*	8.833,7	10.878,3	13.724,5	16.693,4	19.503,9
3	PDRN atas dasar harga pasar (Jutaan rupiah) *PDRN based on current market prices (in million rupiahs)*	238.296,6	288.958,9	358.305,0	429.965,2	505.918,5
4	Pajak tak langsung (Jutaan rupiah) *Indirect tax (in million rupiahs)*	1.338,0	1.770,3	2.565,4	3.226,7	3.319,7
5	Pendapatan Regional (Jutaan rupiah) *Regional Income (in million rupiahs)*	236.956,6	287.188,6	355.739,6	426.738,5	502.598,8
6	Jumlah Penduduk Pertengahan tahun (Jiwa) *Number of population in mid year (persons)*	2.637.692.	2.702.182.	2.767.623.	2.825.300.	2.902.355.
7	PDRB Perkapita (rupiah) *PDRB per capita (rupiah)*	93.691.	110.961.	134.422.	158.092.	181.033.
8	Pendapatan Regional Perkapita (rupiah) *Regional Income per Capita (rupiahs)*	89.835.	106.280.	128.536.	151.042.	173.169.
	Atas dasar harga konstan 1975/*Based on constant market Prices of 1975*					
1	*PDRB atas dasar harga pasar (Jutaan rupiah)* *PDRB based on constant market Prices (in million rupiahs)*	*132.105,1*	*144.104,1*	*161.912,7*	*177 026,2*	*183 815,8*
2	Penyusutan barang Modal (Jutaan rupiah) *Allowance of Capital goods (in million rupiahs)*	5.047,1	5.301,4	5.814,5	6.612,7	6.834,9
3	PDRN atas dasar harga pasar (Jutaan rupiah) *PDRN based on constant market prices (in million rupiahs)*	127.058,0	138.802,7	156.098,2	170.413,5	176.980,9
4	Pajak tak langsung (Jutaan rupiah) *Indirect Tax (in million rupiahs)*	777,4	886,2	1.148,0	1.307,3	1.231,8
5	Pendapatan Regional (Jutaan rupiah) *Regional Income (in million rupiahs)*	126.280,6	137.916,5	154.950,2	169.106,2	175.749,1
6	Jumlah penduduk pertengahan tahun (Jiwa) *Number of population in mid year (Persons)*	2.637.692.	2.702.182.	2.767.623.	2.826.300.	2.902.355.
7	PDRB perkapita (Rupiah) *PDRB per capita (rupiahs)*	50.084.	53.329.	58.502.	62.657.	63.333.
8	Pendapatan Regional Perkapita (rupiah) *Regional Income per Capita (rupiahs)*	47.875.	51.039.	55.987.	59.854.	60.554.

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat

Source : Office of Statistics, NTB Province

tra Tingkat I. Dalam melaksanakan salah satu tugasnya Pejabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menyatakan melikwidir Daerah Lombok dan Sumbawa (masing-masing pada tanggal 17 Desember 1958 dan tanggal 22 Januari 1959). Atas dasar likwidasi tersebut, ditetapkan tanggal 17 Desember 1958 sebagai hari lahirnya Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Periode sesudah berlakunya Undang-Undang No 64 tahun 1958 dan Undang-Undang No 69 tahun 1958, segala urusan dan tugas kewajiban dari eks Daerah-daerah Pulau dan Eks Daerah Swapraja tersebut dialihkan ke Daerah Swatantra Tingkat I untuk selanjutnya secara berangsur-angsur diserahkan kepala Daerah Swatantra Tingkat II.

Sebagai halnya Daerah Swatantra Tingkat I, maka pembentukan Swatantra Tingkat II dimulai dengan pengangkatan seorang pejabat sementara Kepala Daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1958 No Up.7/14/34), masing-masing:

- JB Tuhumena Maspaitela untuk Daswati II Lombok Barat.
- Lalu Mahnep untuk Daswati II Lombok Tengah.
- Idris HM Djatar untuk Daswati II Lombok Timur.
- M Kaharuddin untuk Daswati II Sumbawa.
- MT Siradjuddin untuk Daswati II Dompu.

Sebagai kelengkapan perangkat Pemerintah Daerah kemudian dibentuk DPRD Tingkat I NTB yang prosesnya diselesaikan tanggal 6 Juli 1959 dan dilantik Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1959. Pada tanggal 7 Nopember 1959 memilih Ketua dan Wakil Ketua, masing-masing ditunjuk Madiloe ADT dan Haji Achsyid Mudzhar. Pada tanggal 9 Nopember 1959 DPR secara aklamasi mencalonkan R AR Moh Roeslan Tjakraningrat sebagai Gubernur Kepala Daerah kemudian diangkat dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 24 Desember 1959 Nomor 468/M/1959 (dilantik tanggal 9-2-1960). Pada

Tabel / *Table I - 6*

PERKEMBANGAN PENDAPATAN PERKAPITA PENDUDUK TAHUN 1978/1983

POPULATION INCOME PER CAPITA 1978/1983

No	Tahun *Year*	Pendapatan perkapita *Income per Capita*	
		Harga konstan 1973 *Constant Market Price 1973*	Harga berlaku *Current Market Price*
1	1978/1979	Rp31.967,56,–	Rp 82.952,20,–
2	1979/1980	Rp32.763,79,–	Rp 97.292,11,–
3	1980/1981	Rp34.329,38,–	Rp111.527,16,–
4	1981/1982	Rp36.059,96,–	Rp115.659,–
5	1982/1983	Rp37.663,02,–	Rp135.925,81,–
6	1983/1984	Rp65 742,–	Rp171.179,–

tanggal 8 April 1960 dengan Surat Keputusannya No PD 6/2/13-9 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Susunan Anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 September 1966 No Up.12/3/46-1326 ditetapkan HR Wasita Kusumah selaku pejabat Gubernur menggantikan R AR Moh Roeslan Tjakraningrat. Kemudian dengan Surat Keputusan Presiden Nomor: 48 tahun 1967 diangkat HR Wasita Kusumah selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang dilantik tanggal 16 April 1967.

Untuk masa jabatan kedua berdasarkan Keputusan Presiden No 40/M tahun 1973 tanggal 28 Maret HR Wasita Kusumah ditetapkan

kembali sebagai Gubernur. Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (dilantik pada tanggal 16 April 1973).

Masa jabatan kedua HR Wasita Kusumah berakhir tanggal 10 April 1978 berdasarkan Keputusan Presiden No 67/M/1978. Dan dengan Keputusan Presiden tanggal 9 Agustus 1978 No 178/M/78, Gatot Soeherman diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (dilantik oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 1978). Pada tahun 1983, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1983 No 182/M tahun 1983, H Gatot Soeherman telah diangkat dan dilantik kembali untuk masa jabatan kedua pada tanggal 30 Agustus 1983 sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat masa bhakti tahun 1983-1988.

5 Pemilihan Umum

Perolehan suara masing-masing organisasi peserta Pemilu 1977 di NTB. Lihat Tabel I - 7

Sedangkan jumlah perolehan suara dan jumlah kursi pada Pemilu tahun 1971, lihat Tabel I - 8

Apabila angka-angka perolehan suara dan jumlah kursi tersebut dibandingkan, maka terlihat bahwa di suatu pihak PPP memperoleh peningkatan dan di pihak lain Golkar mengalami kemunduran. Sedangkan PDI memperoleh kursi yang tetap di DPRD I walaupun massa pemilihnya meningkat dari 54.007 pada Pemilu 1971 menjadi 65.294 pada Pemilu tahun 1977.

Meningkatnya suara PPP disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah penggunaan tanda gambar Ka'bah. Tanda gambar itu berpengaruh di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar adalah pemeluk Agama Islam yang taat dan fanatik. Kondisi yang menguntungkan dimanfaatkan oleh PPP.

Di lain pihak potensi-potensi/jalur-jalur dalam keluarga besar Golkar pada saat itu belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum dibina secara intensif sehingga masih banyak anggota-anggota KORPRI yang melakukan tindakan indisiplinier yang justru menguntungkan pihak lain.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 25 tahun 1981, pemungutan suara dilakukan secara serentak di seluruh Wilayah Indonesia pada tanggal 4 Mei 1982. Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan itu, pemilih di NTB datang berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia tanpa paksaan (azas Luber).

Mengenai penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, pimpinan Parpol dan Golkar Tingkat Propinsi dan Kabupaten telah mengeluarkan pernyataan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Daerah NTB telah berjalan aman tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pernyataan tersebut sekaligus merupakan Counter atau jawaban terhadap pihak-pihak lain yang menyatakan bahwa Pemilu tahun 1982 tidah sah.

Berdasarkan hasil penghitungan suara dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

Tabel / *Table I - 7*

No	Organisasi Sosial Politik *Socio-Political Organizations*	Jumlah Suara *Votes*	Prosentase *Percentage*	Jumlah kursi di DPRD I *Seats won in the Regional House of Representatives*
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) *United Development Party*	401.654	36,76%	12
2	Golongan Karya *Functional Group*	620.680	57,37%	18
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) *Indonesian Democracy Party*	63.305	5,87%	2

Tabel / *Table I - 8*

No	Nama Organisasi *Political Organizations*	Jumlah suara *Votes*	Prosentase *Percentage*	Jumlah kursi di DPRD I *Seats Won in the Regional House of Representatives*
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) *United Development Party*	271.962	26,53%	8
2	Golongan Karya (Golkar) *Functional Group*	698.451	66,14%	22
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) *Indonesian Democracy Party*	54.007	5,35%	2

a Pemilihan yang memberikan suaranya berjumlah 1.401.986 orang pemilih (=96,41%) dari 1.455.667 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih dimasa Pemilu tahun 1977 sebanyak 96,01%. Pemilih yang tidak memberikan suaranya dalam Pemilu tahun 1982 sebesar 4,97% sedangkan dalam Pemilu 1977 sebanyak 10,27%.
Dengan demikian berarti bahwa jumlah pemilih yang memberikan suaranya meningkat 0,40% dan pemilih yang tidak ikut Pemilihan Umum menurun 5,30%.

b Perimbangan suara/kekuatan dari ketiga organisasi peserta mengalami perubahan meskipun tidak drastis.
Dalam Pemilu tahun 1977, untuk PDRB I Nusa Tenggara Barat prosentase perolehan suara adalah:
PPP = 36,76%, Golkar = 57,37%, PDI = 5,87%.
Sedangkan dalam Pemilu tahun 1982, prosentasenya adalah sebagai berikut:
PPP = 28,27% (turun 8,49%), Golkar = 68,54% (naik 11,17%), PDI = 3,19% (turun 2,68%).
Dalam jumlah kursi yang diperoleh, maka perimbangannya adalah:
PPP = 9 kursi (turun 3 kursi dari Pemilu tahun 1977)
Golkar = 22 kursi (naik 4 kursi dari Pemilu tahun 1977)
PDI = 1 kursi (turun 1 kursi dari Pemilu tahun 1977).

B A B / *CHAPTER II*

PEMBANGUNAN DAERAH / *REGIONAL DEVELOPMENT*

SELAMA Pelita III di Nusa Tenggara Barat telah diinvestasikan dana pembangunan sektoral sebesar Rp313.286.856.481,- (tiga ratus tiga belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian awal Pelita III sebesar Rp29,35 milyar, tahun kedua sebesar Rp49,78 milyar, tahun ketiga 73,22 milyar, tahun keempat Rp84,00 milyar dan tahun kelima sebesar Rp77,17 milyar.

Melalui anggaran rutin baik dari dana APBD Tingkat I maupun sektoral dalam tahun 1983/1984 saja sebesar Rp54,96 milyar. Sedangkan dalam tahun sebelumnya sebesar Rp54,14 milyar. Dana pembangunan dari berbagai sumber pembiayaan telah dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang meliputi 19 sektor. Dengan penekanan utama pada sektor pertanian dan pengairan dan sarana-sarana pendukungnya.

Untuk merangsang pembangunan di daerah, meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan, serta meningkatkan keserasian antara pembangunan dan regional, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembangunan kepada berbagai tingkat pemerintahan daerah melalui Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Program Bantuan Pembangunan Desa, Program Bantuan Penunjangan Jalan, Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi, Program Bantuan Kredit Pembangunan/Pemugaran Pasar, dan beberapa bantuan lainnya.

Bantuan-bantuan tersebut telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunannya sendiri dan sekaligus melaksanakannya, untuk memajukan daerahnya. Dengan demikian masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diatasi sendiri, dan kebutuhan serta aspirasi daerah dapat dipenuhi oleh kemampuan daerah disamping kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah.

Di NTB, program dan penyelenggaraan bantuan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inpres Pembangunan Dati I

Pembangunan bantuan pembangunan Daerah Tingkat I dikategorikan dalam dua kategori yaitu penggunaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan penggunaan yang diarahkan oleh Pemerintah Daerah.

Penggunaan anggaran yang ditetapkan dimanfaatkan untuk penyempurnaan jalan, jembatan, irigasi dan eksploitasi, serta pemeliharaan pengairan. Sedangkan penggunaan anggaran yang diarahkan yaitu untuk keperluan biaya proyek-proyek yang bersifat ekonomis produktif, pengembangan daerah minus, pengembangan perkotaan, pembinaan golongan ekonomi lemah, pembinaan generasi muda dan proyek lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 1978 jumlah bantuan disediakan sebesar Rp2 milyard lebih yang pada tahun 1982 telah meningkat menjadi Rp9 milyard. Sejak tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983 dana bantuan pembangunan Daerah Tingkat I yang ditetapkan dipergunakan untuk :

Penunjangan jalan 1.744.071 km, penunjangan jembatan 144 buah sepanjang 1.561,48 m, pembuatan gorong-gorong dan deker 122 buah. Perbaikan dan penyempurnaan irigasi yang berupa bendungan 2 buah, saluran 61,829 km, bangunan bagi 49 buah bangunan pelengkap dan lain-lain 138 buah jalan inspeksi 17,30 Km.

Dana eksploitasi dan pemeliharaan pada dasarnya dipergunakan untuk Pemeliharaan sebanyak 70 Daerah irigasi yang tersebar pada 6 Kabupaten. Sedangkan penggunaan anggaran yang diarahkan sejak tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983 adalah untuk 727 proyek di berbagai sektor. (Lihat Tabel II - 1 dan Tabel II - 2).

2. Inpres Pembangunan Dati II

Bantuan pembangunan Daerah Tingkat II pada tahun 1978 sebesar Rp1,245.763 milyard dan pada tahun 1982 telah meningkat menjadi sebesar Rp7,749.215 milyard. Bantuan pembangunan Daerah Tingkat II pada tahun 1978 dipergunakan untuk membiayai 32 proyek lain pada tahun 1982 jumlah proyek yang dibiayai makin meningkat sehingga menjadi sebanyak 184 proyek dan jalan sepanjang 946,159 km. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II pada umumnya diarahkan un-

DURING the Five-Year Development III (Pelita) in West Nusata Tenggara the sectoral development budget has been invested amounting to Rp313,286,856,481 (three hundred thirteen billion two hundred eighty six million eight hundred fifty six thousand and four hundred eighty one rupiah), the details of fiscal year budget of Pelita III were as follows: the first fiscal year was Rp29.35 billion, the second year was Rp49.78 billion, the third year was Rp73.22 billion, the fourth year was Rp84.00 billion and the fifth year was Rp77.17 billion.

Through the routine budget both from APBD (Regional Budget) of Provicial Administration and the sectoral budget was just Rp54.96 billion in 1983/1984. While in the prevoius year the budget was Rp54.14 billion Development budget from various kinds of financing resources has been utilized to finance development activities covering 19 sectors. With the emphasis on agricultural sector and other supporting infrastructures.

To stimulate development in the region, to increase regional participation in the development and also to increase the harmony among the sectoral and regional development, the Central Government has been providing aids to various Regional Administrations through Aid Programme for Provincial Development Projects, Aid Programme for District Development Projects, Aid Programme for Rural Development Projects, Aid Programme for Road Betterment, Aid Programme for Basic Education Development, Aid Programme for Health Facilities Development, Aid Programme for Regreening and Reforestation, Aid Programme for Credit of Marketing Facility Development/Restoration and some other aids.

Those aids have provided broader opportunities to the Regional Administration to arrange its own development plans and all at once to implement them, to develop its region. Therefore the problems faced by the region could be overcome by the region itself, and the needs as well as the regional participation could be met by the regional capability in addition to the development activities which were conducted by Regional Development.

In West Nusa Tenggara, the programme and implementation of development aids are as follows:

1. Inpres Aid for Provincial Development Projects

Aid for Provincial Development is classified in two categories, namely the utilization of aid which is directorated by the Regional Administration. The utilization of determined budget is used for betterment of roads, bridges, irrigation, exploitation and irrigation maintenance as well. While the utilization of directed budget is used for the need of financing of productive economic projects, development of critical regions, city development, and puny economic group promotion, youth promotion and other projects which can increase social welfare.

In 1978 the total aid provided was more than Rp2 billion and in 1982 increased to Rp 9 billion. From 1979/1980 to 1982/1983 the aid budget allocated for Provincial Development were used for:

Betterment of roads 1,744,071 km, bridges 144 units for 1,561.48 m, construction of sewerages, and 122 units of deckers.

Improvement and betterment of irrigation for 2 dams, water channels 61,829 km, complementary building of 49 units and other building 138 units, inspection roads 17.30 km.

Exploitation and maintenance budget was basically used for maintenance of 70 irrigation areas scattered in 6 Sub-districts, while the utilization of directed budget from 1979/1980 to 1982/1983 was for 727 projects in various sectors. See Tables II-1 and II-2.

2. Inpres Aid for District Development Project

In 1978 the budget for District Development was Rp1,245.763 billion and in 1982 development aid increased to Rp7,749.125 billion. Development aid for District Development in 1978 was utilized to finance betterment of roads 102.420 km and other 32 project, and in 1982 the total financed projects increased to 184 projects and 946.159 km of roads. Development aid for District Development is generally directed towards the rehabilitation and improvement of roads and bridges including the completion of irrigation and other important projects.

From 1979/1980 to 1982/1983 the projects were successfully constructed and rehabilitation of roads 946.159 km, bridges 46 units (106.lm), 71 irrigation projects and other 67 projects. See Tables II-3 and II-4.

tuk rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan dan rehabilitasi serta penyempurnaan pengairan dan sejumlah proyek-proyek penting lainnya.

Sejak tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983 telah berhasil dibangun dan atau direhabilitasi jalan sejumlah 946.159 km dan jembatan 46 buah (106,1 meter), pengairan 71 buah dan lain-lain 67 buah. (Lihat Tabel II - 3 dan II - 4).

3. Inpres Pembangunan Desa

Bantuan pembangunan desa setiap tahun selalu meningkat. Jumlah desa yang menerima bantuan adalah 565 desa. Akhir-akhir ini bantuan desa tersebut diarahkan juga untuk bantuan pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Disamping bantuan desa diberikan pula bantuan keserasian yang arah penggunaannya untuk bantuan paket proyek unit daerah kerja pembangunan di Wilayah Kecamatan UDKP yang tergolong miskin, kritis; dan bantuan keseimbangan yang penggunaannya diarahkan untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan pada usaha masyarakat yang mencerminkan potensi swadaya gotong royong.

Selain itu juga terdapat bantuan untuk hadiah bagi pemenang perlombaan desa yang diberikan kepada desa-desa yang telah menunjukkan prestasi tertinggi yang diberikan kepada desa-desa yang telah menunjukkan prestasi tertinggi didalam pembangunan desanya. Dengan demikian jumlah bantuan pembangunan Desa yang pada tahun 1978 adalah sebesar Rp257,9 juta setiap tahunnya meningkat sehingga pada tahun 1982/1983 menjadi Rp356,85 juta. Bantuan pembangunan Desa pada tahun 1978 tersebut telah dapat menghimpun peran serta masyarakat dalam bentuk swadaya gotong royong masyarakat sebesar Rp206.718.665,- atau 44,39% dan bantuan Pemerintah Daerah Rp1.000.000,- atau 0,23% sehingga jumlah biaya seluruhnya yang dipergunakan untuk proyek-proyek prasarana Desa adalah sebesar Rp0,465 milyard.

Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dan Tata Desa

Untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan desa diperlukan koordinasi dan keterpaduan pembangunan baik pembangunan Sektoral, Regional maupun bantuan pembangunan desa. Untuk maksud tersebut diperlukan mekanisme perencana, pelaksana dan pengendalian yang lebih terpadu. Oleh karena itu maka UDKP merupakan wadah yang tepat dalam rangka mengembangkan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan serta pengendali yang terpadu.

Tingkat perkembangan pembentukan Kecamatan UDKP tahun 1978 32 buah Kecamatan dan pada tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 57 Kecamatan atau meningkat sebesar 97% dari jumlah yang ada.

Pemugaran Perumahan Desa

Pada tahun 1978 telah dilaksanakan pemugaran perumahan di 21 Desa yang menjangkau 801 buah rumah. Sampai dengan tahun 1982/1983 pelaksanaan pemugaran perumahan telah mencapai 278 Desa dengan jumlah rumah sebanyak 10.795 buah.

Pembinaan Usaha Gotong Royong

Untuk menampung peran serta segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan di desa-desa telah dibentuk LKMD. Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1982/1983 jumlah LKMD sebanyak 565 buah.

Dengan adanya LKMD disetiap desa dapat diharapkan Desa-desa tersebut akan lebih mampu meningkatkan kegiatan perencanaan pelaksana, pengendali dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pemukiman Kembali Penduduk

Pada tahun 1978 secara komulatif telah dimukimkan kembali 54 Kepala Keluarga di 1 lokasi dan sampai dengan tahun 1982/1983 usaha pemukiman kembali penduduk telah meningkat menjadi 585 KK di 4 lokasi.

Pada lokasi pemukiman kembali Penduduk yang dimukimkan disediakan fasilitas rumah, prasarana jalan dan jembatan, Balai Desa, tempat Ibadah, penyediaan pembibitan, MCK, peralatan pertanian dan jaminan hidup.

4. Inpres Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu jalur dari Delapan Jalur Pemerataan. Untuk mempercepat usaha pemerataan tersebut, maka khusus dibidang pendidikan Dasar dikembangkan Inpres Sekolah Dasar yang tujuannya untuk menampung penduduk kelompok umur Pendidikan Dasar 7 - 12 tahun yang pada akhir Pelita III mencapai 100%.

Pada akhir Pelita II jumlah Inpres Sekolah Dasar adalah sebanyak 709 unit sehingga jumlah prasarana Pendidikan Dasar keseluruhan-

Tabel / *Table II - 1*

PERKEMBANGAN VOLUME FISIK DARI BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I DARI DANA YANG DITETAPKAN TAHUN 1978-1982/1983.

PHYSICAL REALIZATION VOLUME OF AID FOR PROVINCIAL DEVELOPMENT FROM THE ALLOCATED BUDGET, YEAR 1978-1982/1983

Uraian / *Description*	Awal Pelaksanaan tugas 1978 / *First Year of Project realization*	Dalam pelaksanaan tugas / *Project Realization* 1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983
1 Penunjangan Jalan/ Jembatan : *Betterment for roads and bridges* :					
- Jalan/*road* (km)	421.950	115.250	330.076	553.450	544.695
- Jembatan (m)	-	-	-	-	-
- Pembuatan Gorong-gorong/culverts (m) *Construction of sewerages (m)*	32	3	18	-	101
- Penggantian *Substitution*	44	578.95	371.2	285.53	325.8
2 Perbaikan dan penyempurnaan Irigasi : *Improvement and Completion of irrigation* :					
- Waduk (buah) *Reservoir (unit)*	-	-	-	-	-
- Bendungan (buah) *dam (unit)*	-	1/3	1/10	-	2
- Saluran (km) *Water Channel (km)*	10	7	10.930	19.550	24.349
- Bangunan Bagi (buah) *Distribution Control (unit)*	9	6	9	10	24
- Bangunan Pelengkap (bh) *Complementary Building (unit)*	14	16	12	26	84
3 dan lain-lain/*others*	-	-	-	-	-

Tabel / *Table II - 2*

PERKEMBANGAN PROYEK YANG TELAH DIBANGUN DARI DANA YANG DIARAHKAN (BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I) 1978-1982/1983

PROJECT REALIZATION WHICH HAVE BEEN ESTABLISHED FROM THE DIRECTED BUDGET (AID FOR PROVINCIAL DEVELOPMENT) 1978 - 1982/1983

No	Uraian / *Description*	Awal Pelaksanaan tugas 1978 / *Project Realization 1978*	Dalam pelaksanaan tugas / *Project Realization* 1978/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983
1	Proyek dilingkungan Sekretariat Daerah *Project related to Regional Secretariat.*	49	57	44	46	30
2	Proyek dilingkungan Pekerjaan Umum *Project in the Department of Public Works*	7	9	9	10	10
3	Proyek dilingkungan perhubungan dan pariwisata *Project in the Department of Communication and Tourism*	6	3	4	4	3
4	Proyek dilingkungan Pertanian *Project in the Department of Agriculture*	11	6	7	9	3
5	Proyek dilingkungan Perekonomian *Projects related to the economic activities*	48	39	38	36	19
6	Proyek dilingkungan Sosial Budaya *Projects related to the Social and Cultural Activities*	22	35	31	34	41
7	Proyek dilingkungan bidang-bidang lainnya. *Other projects*	55	73	39	52	66

Tabel / *Table II - 3*

PERKEMBANGAN HASIL FISIK PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1978-1982/1983.

PHYSICAL REALIZATION OF DEVELOPMENT AID FOR DISTRICT DEVELOPMENT PROJECTS IN 1978-1982/1983

No	Uraian / *Description*	Awal Pelaksanaan tugas 1978 / First year of Projects Realization 1978	Dalam pelaksanaan Tugas / *Project Realization* 1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983
1	Jalan/*Roads* (km)	102.420	125	231.2	243.665	346.294
2	Jembatan/*Bridges* (m)	453.4	181.6	309	101.9	868.7
	- Jumlah Proyek (bh) *Total Projects (unit)*	13	10	17	9	10
3	Pengairan/*Irrigation*	11	23	9	25	14
	- Jumlah Proyek (bh) *Total Projects (unit)*					
4	Lain-lain/*Others*	8	9	23	16	19
	- Jumlah proyek (bh)					

3. Inpres Aid for Rural Development

Aid for rural development increased annually. The total villages which received the aid were 565 villages. Recently the aid for rural development has also been directed towareds the Family Welfare Promotion. In addition the aid for rural development was also provided for the harmony of aid of which its utilization was directed towards the package of UDKP/Development Work Area Unit in Sub-district classified critical areas and the balance aid of which its utilization was directed to guarantee the harmonious rural development based on the people's efforts reflecting the self-supporting potential and mutual assistance.

In addition rewards were also provided for the winners of rural championship to the village which has shown the hignest achievement in developing its environment. Thus the total aid for rural development was Rp 257,9 million in 1978 and it increased annually so that in 1982/1983 the total aid for rural development was Rp 356.87 million. The aid for rural development of 1978 budget was able to support people's participation in the form of self-supporting of people's mutual assistance. It was Rp206,718,665 or 44.39 % and aid for Regional Administration Rp1,000,000 or 0.23 % so that the total budget which was used to finance rural development projects and infrastructure amounted to Rp 0.465 billion.

Tabel / *Table II - 4*

PERKEMBANGAN JUMLAH BANTUAN DESA

1978 - 1982 / 1983.

REALIZATION OF TOTAL BUDGET OF RURAL AID DEVELOPMENT

1978-1982/1983

No	Uraian / *Description*	Awal Pelaksanaan tugas 1978/1979 / *First year of Projects Realization 1978*	Dalam Pelaksanaan Tugas / *Project Realization* 1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983
1	Jumlah Desa *Total Villages*	565	565	565	565	565
2	Bantuan tiap Desa *Aid for each village*	350.000	450.000	750.000	1.000.000	1.250.000
3	Jumlah bantuan *Total aids*	261.540.000	326.930.000	521.487.000	774.630.000	919.250.000
	a Paket Proyek EDKP *Package Project of UDKP*	7.500.000	15.000.000	18.000.000	75.000.000	100.000.000
	b Keseimbangan *b Balance*	45.000.000	46.390.000	60.307.000	84.430.000	60.000.000
	c Hadiah Lomba Desa *c Reward for Rural Contest*	7.650.000	7.650.000	12.150.000	39.000.000	39.000.000
	d Pembinaan Tingkat *d Status Promotion*	3.640.000	3.640.000	7.280.000	11.200.000	14.000.000

nya (termasuk non Inpres 1.045 unit dan Ibtida'yah 360 unit) menjadi 2.114 unit. Prasarana fisik tersebut dapat menampung murid 357.114 orang atau 77,45% dari kelompok umur Pendidikan Dasar 7 - 12 tahun sebanyak 561.078 orang. Pada saat itu jumlah guru yang tersedia sebanyak 11.352 orang atau dengan kata lain seorang guru dapat membimbing ± 31 orang murid.

Perkembangan Pendidikan Dasar sampai dengan akhir tahun 1982 baik dari jumlah prasarana pendidikan dasar maupun guru serta murid menunjukkan angka-angka yang makin meningkat. Pada tahun tersebut jumlah Sekolah Dasar telah menjadi sebanyak 2207 unit, diantaranya 1.157 SD Inpres. Jumlah Sekoiah Dasar tersebut dapat menampung murid 516.404 orang, atau sebanyak 100,62% dari jumlah kelompok umur Pendidikan Dasar 7 - 12 tahun sebanyak 513.197 orang.

Penambahan jumlah guru sampai dengan akhir tahun 1982 sebanyak 3.508 orang sehingga pada saat ini jumlah keseluruhan guru telah mencapai 14.860 orang. Apabila dikaitkan dengan jumlah desa maka setiap desa rata-rata telah memiliki hampir 4 unit SD atau setiap lingkungan/dusun rata-rata memiliki 1 unit SD.

Atas dasar data jumlah prasarana dan sarana tersebut di atas berarti Nusa Tenggara Barat telah dapat menyiapkan diri untuk melaksanakan wajib belajar.

5. Inpres Kesehatan

Dalam Pelita II telah dibangun 62 buah Puskesmas melalui dana Inpres Kesehatan dan direhabilitir 14 buah Puskesmas non Inpres. Disamping penyediaan sarana fisik juga disediakan ... batan maupun

UDKP/Development Work Area Unit and Rural Management

To reinforce the implementation of rural development that the coordinated and integrated development, sectoral development, sectoral, regional as well as aid for development are needed. For that purpose, the planning mechanism, implementation and more integrated control are needed. Therefore UDKP is the right place within the effort to develop planning mechanism, implementation and integrated control.

In 1978 the development of UDKP was 32 Sub-districts and in 1982/1983 it increased to 57 Sub-districs or an increase of 97 % from the existing Sub-districts.

Rural Housing Restoration

In 1978 housing restoration was executed in 21 villages covering 801 houses. Until 1982/1983 the housing restoration reached 278 villages covering 10,785 houses.

Promotion of Mutual Work Assistance

To support the participation of various classes in the society in the development, LKMD Rural Community Resilience Institution has beeb set up in the villages. From 1978 to 1982/1983 the total of LKMD were 565 units.

Due to the existence of LKMD it is hoped that the villages would be able to increase the implementation of planning activities, controlling and maintaining of the results of development

sarana air bersih yang terdiri dari perpipaan perlindungan mata air, SPT dangkal, SPT dalam dan beberapa jenis sarana air bersih lainnya.

Pada akhir Pelita II telah dipasang 230 SPT dangkal, 50 SPT dalam, 19 perpipaan, dan sarana air bersih, yang dibangun pada daerah perkotaan. Dari semua kapasitas produksi air bersih tersebut baru mampu melayani 17,06% dari jumlah penduduk yang ada.

Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam Repelita III makin ditingkatkan, sehingga sarana kesehatan maupun sarana air bersih sampai saat ini telah makin luas dan merata.

Pada saat ini telah dimiliki 75 buah Puskesmas dan 166 buah Puskesmas pembantu. Dengan demikian setiap Kecamatan dan perwakilan Kecamatan telah memiliki Puskesmas dan bahkan bagi Kecamatan yang mempunyai penduduk yang lebih dari 30.000 jiwa memiliki 2 buah Puskesmas. Sedangkan setiap Puskesmas Pembantu melayani 3 desa.

Penyediaan fasilitas kesehatan tersebut juga diimbangi dengan penyediaan tenaga kesehatan yang makin meningkat sehingga pada saat ini tenaga medis dan para medis adalah masing-masing 1 : 20.285 dan 1 : 2.986 jiwa.

Pada akhir Pelita III ratio tersebut menjadi 1 : 17.420 jiwa. Sedangkan fasilitas air bersih selain menunjukkan makin meratanya pelayanan kepada masyarakat juga makin merata pendistribusiannya.

6. Inpres Pasar

Sejak tahun 1976/1977 sampai dengan tahun 1981/1982 melalui Inpres Pasar telah dialokasikan dana sejumlah 2 milyard lebih yang digunakan untuk membangun los pasar sebanyak 132 buah dan kios sejumlah 725 buah dengan luas keseluruhan 35.038,38 m2. Jumlah pedagang yang ditampung sebanyak 8.245 orang dengan perincian 7.520 orang ditampung pada los-los pasar dan 725 orang ditampung pada kios-kios.

Los pasar dan kios tersebut tersebar pada 6 Kabupaten sehingga sangat membantu pedagang/pengusaha golongan ekonomi lemah yang pada dasarnya belum mempunyai tempat usaha yang layak.

7. Inpres Penunjangan Jalan

Inpres Penunjangan Jalan diarahkan untuk meningkatkan kondisi jalan. Jalan Kabupaten yang sangat rusak dan untuk membuka daerah-daerah potensial yang terisolir.

Sebelum adanya Inpres Penunjangan Jalan, Kondisi jalan Kabupaten yang panjangnya 1.297 km hanya 15% dalam kondisi baik, 31% sedang, dan 54% buruk. Disamping itu terdapat beberapa kecamatan yang terisolir dan hanya dihubungkan oleh jalan setapak.

Sejak tahun 1979/1980 hingga tahun 1982/1983 jumlah dana bantuan Inpres Penunjangan Jalan sebesar Rp7,2 milyard lebih. Dari dana tersebut telah berhasil ditingkatkan kemampuan pelayanan jalan Kabupaten sepanjang 520,281 km, jembatan sepanjang 1.943,7 m, sehingga kondisinya menjadi 24% baik, 29% sedang dan 47% buruk.

Disamping itu dengan adanya Inpres Penunjangan Jalan telah dapat dibuka kecamatan yang terisolir di Lombok bagian utara maupun selatan, Kecamatan Lunyuk dan Jereweh di Sumbawa, Kecamatan Kilo dan Perwakilan Kecamatan Kempo (Calabai) di Dompu dan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bima bagian utara dan selatan.

8. Inpres Penghijauan dan Reboisasi

Dalam Pelita II telah dialokasi dana Inpres Penghijauan dan reboisasi sebesar Rp724 juta lebih dengan target fisik seluas 32.012 Ha penghijauan dan seluas 7.450 Ha reboisasi. Tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman dari target fisik ± 30% untuk penghijauan dan 40% untuk reboisasi.

Selanjutnya sampai tahun keempat Repelita III telah dialokir dana Inpres Penghijauan dan Reboisasi sebesar Rp8,6 milyard dengan target fisik penghijauan seluas 229.504 Ha dan reboisasi seluas 23.705 Ha. Tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman telah dicapai 35% untuk penghijauan dan 40% untuk reboisasi.

Rekapitulasi Bantuan Inpres Pelita III

Selama Pelita III jumlah dana yang telah diserap Program Inpres Dati I adalah Rp33.071.990.000,- dengan jumlah provek yang dihasilkan 538 buah. Rekapitulasi jumlah proyek dan dana Inpres Dati I Nusa Tenggara Barat selama Pelita III,

Bantuan pembangunan Daerah Tingkat II, pada umumnya diarahkan untuk rehabilitasi dan peningkatan jalan, jembatan, rehabilitasi dan peningkatan irigasi proyek-proyek lainnya. Jumlah seluruh bantuan pembangunan daerah tingkat II yang diterima selama Pelita III adalah Rp13.283.628.000,- dengan jumlah proyek 481 buah.

Inhabitant Resettlement

In 1978, 54 families were resettled in one location and untill 1982/1983 the effort to resettle the inhabitants increased to 585 families in 4 locations.

In the resettlement location they were provided with housing facilities, infrastructure of roads and bridges, Village Hall, worship-place, provision of seedllings, public bath and toilet, agricultural equipment and allowance.

4. Inpres Aid for Education.

Educational field is one of the Eight File Equity. To accelerate the effort of equitable distributions, especially in the field of basic education Inpres Aid for Basic Education was developed to accommodate citizens 7 – 12 year of age for basic education, of which in the end of Pelita II to reach 100 %.

In the end of Pelita II the total Inpres Aid for Basic Education were 709 units that the total Basic Education Infrastructure (including Non-Inpres were 1,045 units and Ibti'dayah 360 units) increased 2,114 units. Those physical infrastructure could accommodate 357,114 pupils or 77.45 % of BASIC Education from 7 – 12 year group of age 561,078 pupils. At that time the availability of teachers were 11,352 persons or in orther words one teacher could teach and guide ± 31 pupils. Till the end of 1982 Basic Education growth from the total basic education infrastructure, teachers and pupils showed the increasing figures. In that year the total Basic Education reached 2,207 units, some of which 1,157 units were Inpres-Aid. The total Basic Educations could accommodate 516,404 pupils or 100.62 % from the Basic Education 7 – 12 group of age 513,197 pupils.

In 1982 the recruitment of new teachers were 3,508 persons that until to the present time the number of the teachers have reached 14,860 persons. If it is related to the total villages so at the avarage of each village has 4 units of Basic Education or each environment has one unit of Basic Education.

Based on the numbers infrastructure and facilities mentioned above that West Nusa Tenggara could prepare itself to conduct compulsary education.

5. Inpres-Aid for Health Development.

In the Pelita II 62 units of Public Health Centres have been established through Inpres-Aid for Health Development and 14 units of Non-Inpres Public Health Centres have been rehabilitated. In addition the provision of physical facilities thre are also provision of medicines and clear water facilities comprising of pipes construction for spring water protection, shallow and deep SPT and several kinds of clean water facilities.

In the end of Pelita II 230 units of shallow SPT (manual-pump well); and 50 units of deep SPT, 19 pipes, and clear water facilities have been installed in the city areas. From the capacity of clean water production it only serves 17.06 % of population.

The efforts of increasing the standard of public health were improved in the Pelita III, so the health and clean water facilities are more extensive up to the presenet time.

At the present time there are 75 units of Public Health Centres and 116 units of Auxiliary Public Health Centres. Thus each Sub-district and the representative of Sub-district already have Public Health Centres and even the Sub-district which more than 30,000 inhabitants has 2 units of Public Health Centres. While each Auxiliary Public Health Centre has to serve 3 villages.

The provision of health facilities are also balanced with the provision more increasing medical workers, those at the present time the provision of doctors and non-doctors are respectively 1:20,285 and 1:2,986.

In the end of Pelita III the ratio is 1:17,420. In addition not only clean water facilities were provided but also the services to the public were more extended as well as its distribution.

6. Inpres-Aid for Marketing Facility Development.

From 1976/1977 to 1981/1982 the budget was allocated more than Rp2 billion through the Inpres-Aid for Marketing Facility Development to build 132 units of markets sheds and 725 units of kiosks with the total building areas of 35,038.38 m2. The total traders accommodated were 8.245 persons with the detail as follows: 7,520 persons were accommodated in the market sheds, and 725 persons were accommodated in the kiosks.

Market sheds and kiosks scattered in 6 Districts that they could assist puny economic groups who have no proper place to trade.

7. Inpres-Aid for Road Betterment.

Inpres-Aid for Road Betterment was directed to improve the bad condation of roads in the Districts and to open the potential isolated areas.

Before Inpres-Aid for Road Betterment was issued, the condition of roads in the district with 1,297 in length, only 15 % of which was in good condition, 31 % was moderate and 54 % was in bad condition. In addition there also isolated Sub-districts which could only be connected the very small roads.

From 1979/1980 to 1982/1983 the total budget of Inpres-Aid for Road Betterment was more than Rp 7.2 billion. From that budget the capability

9. Penanaman Modal

Pada prinsipnya pelaksanaan penanaman modal ditujukan bagi peningkatan atau memperluas kapasitas produksi Nasional, pemerataan pembangunan, peningkatan penerimaan devisa dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, pengembangan dunia usaha yang merupakan salah satu faktor bagi berhasilnya kegiatan pembangunan di Propinsi NTB terus digalakkan dan di intensifkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Menurut data yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKMD) Dati I NTB, Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah memperoleh SPT (Surat Pemberitahuan Terdaftar) dan sudah mulai beroperasi di daerah ini hingga bulan Maret 1986 mencapai jumlah investasi sebesar Rp1.368.376.800,-. Sedang perusahaan yang menanam investasinya ialah PT Britisch American Tobacco (BAT) dengan bidang usahanya bergerak di sektor pertembakauan Virginia. Dengan lokasi usaha di P Lombok serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 584 orang.

Di samping itu sampai akhir bulan Maret 1986 jumlah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan terkumpul dari 5 buah perusahaan sudah mendapat SPT dan sudah beroperasi, mencapai Rp7.178.170.053,- dan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 12.026 orang terdiri dari 7 orang tenaga asing serta 12.019 tenaga Indonesia. Perinciannya adalah sebagai berikut : PT Industri Dagang "Sumber Ampenan", bergerak di bidang Industry minyak goreng (kelapa), lokasi di Cakranegara dengan nilai investasi Rp225.758.053,-. Persero PT Perkebunan XXVII dengan bidang usaha penanaman kapas/industri pengupasan biji kapas, mampu menyerap 11.203 tenaga kerja dengan investasi Rp1.244.500.000,- dan berlokasi di daerah Puyung, Lombok Tengah. PT Paloma Agung untuk budidaya mutiara, mampu menyerap 59 tenaga kerja dengan investasi Rp684.200.000,- berlokasi di Tanjung Bera, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa dengan areal pengusahaan seluas 5 hektar; PT Veneer Product Indonesia dengan bidang logging Sawmill, mampu menyerap 322 tenaga kerja, dengan nilai investasi sebesar Rp1.766.875.000,- dan berlokasi di Calabai, Kecamatan Kempa, Kabupaten Dompu; PT Senada Indah Jaya mengelola bidang penambakan udang dan Cold Storage yang berlokasi di Wawanduru, Kab Dompu, investasinya sebesar Rp3.256.837.000,- dan mampu menyerap sebanyak 297 tenaga kerja, dengan pengelola dari PT Senada Indah Jaya.

Tabel / ***Table II - 5***

No	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Jml Proyek *Total Project*	Jml. Dana (Rp) *Total Budget (Rp)*	Ket. *Remark*
1	*1979/1980*	*103*	*2.524.990.000*	***Kenaikan dana***
2	1980/1981	123	5.050.000.000	rata-rata 42,13%
3	1981/1982	130	7.500.000.000	Average increase
4	1982/1983	81	9.000.000.000	*of budget*
5	1983/1984	101	9.000.000.000	
	Jumlah/*Total*	538	33.074.990.000	

Sedangkan untuk proyek PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang mendapatkan SPT dari Pusat sebanyak 8 buah perusahaan, dengan nilai Investasi sebesar Rp14.200.000.000,-. Bidang usahanya meliputi pengolahan makanan ternak, peternakan sapi, tambak udang, perhotelan dan pengusahaan hutan serta industri penggergajian kayu.

Usaha makanan ternak diusahakan oleh PT Lombok Pelleting Corporation dengan jumlah investasi Rp1.500.000.000,-. Lokasi pengusahaan terdapat di kecamatan Gembalan Kembar, Kabupaten Lombok Barat. Sedang Peternakan sapi yang berlokasi di Lamere, kecamatan Sape, Kabupaten Bima, nilai investasinya mencapai sebesar Rp525.000.000,- dikelola oleh PT Lambu Agung. Usaha yang serupa di Lalaan, kecamatan Bayan, Lombok Barat diusahakan oleh PT Aneka Tani dengan nilai investasi sebesar Rp425.000.000,-

Bidang usaha tambak udang antara lain diusahakan oleh PT Sami Tunggal Kayun dan berlokasi di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, dengan investasi sebesar Rp1.500.000.000,-. PT Mina Aqua Cultura dengan investasi sebesar Rp2.350.000.000,- berlokasi di desa Gontor, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa; PT Teluk Cempi Fishery dengan nilai investasi sebesar Rp3.000.000.000,-, berlokasi di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa.

Sementara itu penanaman modal di bidang Perhotelan di lakukan oleh PT Aero Wista dengan nilai investasi Rp900.000.000,- dengan lokasi di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Bidang pengusahaan hutan dan industri penggergajian kayu yang merupakan komoditi ekspor non-migas dikelola oleh PT Jati Alam

services were successfully increased for the construction of District roads of 520.281 km, bridges of 1,943.7 m, that 24 % of which was in good, 2 % moderate and 47 % in bad condition.

In addition, due to the Inpres-Aid for Betterment it has opened the isolated Sub-district in northern and southern parts of Lombok, Lunyuk and Jereweh Sub-districts in Sumbawa, Kilo Sub-district and representative of Kempo Sub-district (Calabai) in Dompu and other Sub-districts in the northern and southern parts of Bima District.

8. Inpres-Aid for Regreening and Reforestation.

In the Pelita II the Inpres-Aid for Regreening and Reforestation was allocated more than Rp724 million with the physical target 32,012 ha for regreening and 7,450 ha for reforestation. The physical target for the success rate of plantation growth were ± 30 % for regreening and ± 40 % for reforestation.

Furthermore untill the fourth year of Five Year Development Plan III (Repelita III) the Inpres-Aid for Regreening and Reforestation has been allocated amounting to Rp8.6 billion with the physical target of regreening 229,504 ha and reforestation 23,705 ha. The success rate of plantation growth reached 35 % for regreening and 40 % for reforestation.

Recapitulation of Inpres-Aid for Pelita III

During the Pelita III the total budget which has been absorbed by the Inpres-Aid for District Project Development Programme was Rp33,071, 990,000, with the projects resulted were 538 units. The recapitulation of total projects and budget of Inpres-Aid for Provincial Development Projects in West Nusa Tenggara during Pelita III. See Table II–5.

The aid for District Development Projects, are generally directed towards the rehabilitation and improvement of roads, bridges and other irrigation projects. The total Inpres-Aid for District Development Projects during Pelita III was Rp 13,283,628,000 with the total projects 481 units.

9. Investment

In principle the implementation of investment is directed towards the increase and enlargement of National Production Capacity, equitable distribution of development, foreign exchange earning and employment oportunities for the people.

In this respect, enterpreneurship development is one factor for the success of development activities in West Nusa Tenggara Province which are continually stimulated and intensified by the Regional Administration.

Based on the data from the Regional Coordinating Investment Board of West Nusa Tenggara Province, Foreign Investment which has received the Permanent Approval and operating in that region is the PT British American Tobacco (BAT) with its total investment reached to Rp 1,368,376,800, until March 1986. The PT British America Tobacco works in the field of Virginia Tobacco. The location of company is located in Lombok Island and it employs 584 workers.

In addition untill the end of March 1986 the total domestic invesment for 5 companies which received the Registered Informing Letter and already in operation amounted to Rp7,178,170,053 and it absorbed 12.026 workers comprising of 7 foreigh employees and 12,019 Indonesian employees. The details are as follows; PT. Industri Dagang "Sumber Ampenan", has been working in the field of coconut oil, the location is situated in Cakranegara with investment value Rp225,758,053. PT Perkebunan XXVII (Estates State Owned Company), in the field of cotton plantation/cotton-seed-peeling, absorbs 11,203 workers with the total investment Rp1,244,500,000 and located in the Payung region, Central Lombok. PT Paloma Agung, in the field of pearl breeding, employes 59 workers, with the investment Rp684,200,000 and located in Tanjung Bera, Taliwang Sub-district, Sumbawa District, with the concession area 5 ha. PT Veneer Product Indonesia, in the field of logging sawmill, employs 322 workers, with the investment Rp1,766,875,000, located in Calabai, Kempa Sub-district, Dompu District. PT Senada Indah Jaya shrimp raising and Cold Storage located in Wawandaru, Dompu District, with its investment Rp3,256,837,000, and employs 297 workers.

While for the domestic investment projects which received the Permanent Approval were 8 companies, with the investment value Rp14,200,000,000, covering in the fields of cattle-feed processing, cattle breading, shrimp raising, hotels and forest concession, sawmill industry.

The cattle feed business is managed by the PT Lombok Pelleting Corporation with the total investment Rp1,500,000,000, located in Gembalan Kembar Sub-district, West Lombok District. While the cattle breeding is located in Lamere Sape, Bima Districts, the investment value reached to Rp525,000,000, managed by the PT Lambu Agung. The same business in also managed by the PT Aneka Tani, located in Lalaan, Bayan Sub-district, West Lombok with the investment value Rp425,000,000.

Lestari dengan nilai investasi sebesar Rp4.000.000.000,- Daerah operasinya terletak di Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya, hingga bulan Maret 1986 proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dari penanaman modal dalam negeri dan dalam proses persiapan proyek serta telah memperoleh SPT sebanyak 12 buah perusahaan. Kedua belas perusahaan tersebut kegiatannya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.509 orang dengan perincian 35 tenaga asing sedang sisanya sebanyak 3.278 tenaga Indonesia. Dengan jumlah investasi seluruhnya sebesar Rp70.216.000.000,-

Proyek-proyek Khusus

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang Pariwisata, sasaran yang dicapai di bidang itu oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk menerima arus wisatawan dalam Pelita III sejumlah 4.347 orang, atau kenaikan rata-rata sebesar 35% tiap tahunnya.

Untuk pengembangan potensi wisata di Nusa Tenggara Barat di tahun 1981/1982 diadakan survey pada obyek wisata di Gili Air, Sire, Senggigi, Batu Bolong dan Batu Layar. Dalam tahun 1982/1983 dilaksanakan hingga ke Bima (Sepe). Bidang pariwisata di daerah ini mampu menyerap dana sebesar Rp209.249.500,-. termasuk untuk program pembinaan dan pengembangan pariwisata daerah.

Program ini bertujuan mengadakan penelitian dan pengembangan dunia pariwisata dengan sumber pembiayaan dari APBN yang dalam tahun 1982/1983 dialokasikan sebesar Rp74.260.000,-. Dengan kegiatan fisik meliputi dua unit, antara lain detail design resort pantai Senggigi, Pantai Sire dan Dili Air, perencanaan fisik resort pantai Putri Nyale, Pantai Bunut, Pantai Sipet, Tanjung dan desa Rambitan. Di samping pembinaan masyarakat dan pengembangan obyek wisata/industri wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat.

Dalam tahun 1983/1984 kegiatan pembangunan fisik ditingkatkan terutama untuk persiapan penerimaan arus wisatawan dari Bali maupun sebagai jembatan penghubung dalam membuka isolasi arus pariwisata ke pulau "Komodo" di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Untuk mengembangkan bidang pertambangan di daerah ini, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat mengadakan kerjasama dengan pihak Direktorat Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan untuk mengadakan penelitian potensi tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahan-bahan tambang yang memungkinkan dikembangkan adalah : mangaan, perlit, gips, timah hitam, gamping dan lain-lain.

Melalui program pengembangan di tahun 1982/1983, disediakan dana sebesar Rp22.020.000,- yang keseluruhannya bersumber dari APBN. Sedang dalam tahun 1983/1984 diperoleh dana sebesar Rp126.235 juta dari APBN, yang tertuang melalui proyek Pertambangan dan Energi wilayah Mataram.

10. Bantuan Lainnya

CIDA (Pengembangan Sumber-sumber Air di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa)

Dalam rangka pengembangan sumber air, baik untuk pertanian, air minum, industri dan sebagainya di NTB dilaksanakan proyek pengembangan sumber-sumber air dengan bantuan/kerja sama dengan Pemerintah Kanada (CIDA). Untuk pulau Lombok dimulai tahun 1973, dan berakhir tahun 1977, dan untuk pulau Sumbawa dimulai tahun 1979 dan berakhir tahun 1982. Tujuan Umum dari P3SA, adalah penelitian dibidang pengairan guna perumusan perencanaan, pengembangan sumber-sumber air dalam rangka perwujudan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan nasional di daerah.

Hasil-hasil yang dicapai untuk pulau Lombok adalah sebagai berikut :

- Rekomendasi Pembangunan waduk Batu Jai, Pengga dan Salkung.
- H L D (High Level Diversion) yaitu pengaliran air dari Lombok Barat (Sungai Jangkuk, Sungai Babakan) dan dari sungai Babak ke sungai Renggung (Lombok Tengah).
- Pengembangan air tanah untuk irigasi dan air minum seperti di daerah Gerung, Korleko, Sengkol dan lain-lain.
- Rehabilitasi Irigasi Jurang Sate.

Sedangkan hasil yang dicapai untuk Pulau Sumbawa adalah :

1 Development Plan and Executive Summary.
2 Technical Report, yang meliputi :
   a Climate report
   b Hidrology report.
   c Soil and Land Use.
   d Topographic Survey.
   e Groundwater report.

The business of shrimp raising among others are managed by the PT Sami Kayun, located in Sekatong Sub-district, West Lombok, with the investment Rp1,500,000,000. PT. Mina Aqua Cultura, with the investment Rp2,350,000,000, located in Gontor, Alas Sub-district, Sumbawa District; PT Teluk CEMPI Fishery with the investment value Rp3,000,000,000, located in Dompu Sub-district, Dompu District, Sumbawa Island.

Meanwhile investment in the hotel business is managed by the PT Aero Wisata with the investment value Rp 900,000,000 located in Senggigi Tourist Area, West Lombok District.

The business of forest concession and sawmil industry are non-oil and gas export commodities which are managed by the PT Jati Alam Lestari with the investment value Rp4,000,000,000. Its operational area is located in Sumbawa Besar Sub-district, Sumbawa District.

Furthermore, until March 1986 development projects which have been financed through domestic investment and in the process of project preparation are 12 companies. Those companies have received the Registered Informing Letter and could employ 3,509 workers with the detail as follows, 35 foreign workers and the rest are 3,278 Indonesia workers. The total investment was Rp70,216,000,000.

Special Projects

In line with the central government policy on tourism, the target achieved by regional government of West Nusa Tenggara to receive the flow of tourism in the Third Five Year Development Plant totalled 4.347 - persons, or an increase of 35 % annually.

In order to develop tourism potential in West Nusa Tenggara in 1981/1982 a survey was conducted in the tourist object of Gili Air, Sire, Senggigi, Batu Bolong and Batu Layar. In 1982/1983 the survey was conducted up to Bima (Sape). Tourism in this region could absorb fund amounted to Rp209,249,500,- including the program to promote and develop tourism in these region.

This program was intended to carry out research and to develop tourism with financial source from the State Budget which in 1982/1983 was allocated Rp72,260,000.- The physical activities comprise of 2 units i.e. details of design on Senggigi beach, Sire and Gili Air beach, physical planning for Putri Nyale beach, Bunut, Sipet and Tanjung and Rambitan village. Furthermore guidance was also provided to the community and for the development of other tourist objects in West Nusa Tenggara.

In 1983/1984 activities for physical development was increased, particularly for receiving the flow of tourist from Bali or as a connecting bridge to open isolation of tourist inflow to "Komodo" island in East Nusa Tenggara.

To develop mining sector in this region the regional government of West Nusa Tenggara in cooperation with the Directorate of Mineral Resources, Department of Mining, conducted a survey on mining potential. The result of the research indicated that mining material that could be developed would be manganese, perlit, gips, black lead, lime, etc.

Through development program the government provide fund totalled RP 22,020,00,- which the whole amount came from the State Budget, where as in 1983/1984 the fund from the State Budget was Rp126.235 million which was provided through mining and energy project of Mataram Region.

10. Other Assistance

C I D A (Development of Water Resources in Lombok and Sumbawa island)

In the framework of developing water resources, either for agriculture, drinking water, or industry, etc. in West Nusa Tenggara, the development of water resources project was carried out with assistance/cooperation of the government of Canada (CIDA). In Lombok island the project was started in 1973 and ended in 1977, whereas for Sumbawa island the project was started in 1979 and ended in 1982. The general purpose of the P3SA project is to carry out research on irrigation for the formulation of planning, development of water resources in the framework of achieving equitable distribution of development and its gains in the regions. The results that have been achieved in Lombok island are as follows :

- *Recommendation for the construction of Batu Jai, Pengga and Salkung dams.*
- *H L D (High Level Diversion), that is the flow of water from West Lombok (Jangkuk river, Babakan river) and from Babak river to Renggung river (Central Lombok).*
- *The development of spring water for irrigation and drinking water in some areas like Gerung, Korleko, Sengkol etc.*
- *Rehabilitation of Jurang Sate irrigation*

The results that have been achieved in Sumbawa island are :

f Watershed/reservoir Development Studies.
g Irrigation studies.
h Agronomy report.
i Livestock.
j Economic report.
k Fisheries studies.
l Geotechnical Investigations.

World Bank (PPIPD)

Nama lengkap proyek PPIPD NTB-NTT adalah proyek penyiapan program investasi pembangunan di daerah NTB dan NTT atau dalam bahasa Inggris disebut Regional Planning and Preparation of Investment-oriented Projects in NTB-NTT. Proyek ini (INS/78/046) merupakan suatu proyek bantuan tehnis dibiayai oleh UNDP (United Nation Development Programme atau program pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa) yang dikelola oleh Bank Dunia.

Proyek tersebut merupakan kelanjutan dari pada study pengembangan regional Indonesia bagian Timur, EIRDS, (East Indonesian Regional Development Study) yang dilaksanakan oleh CIDA (Canadian International Development Agency). Proyek tersebut mula-mula direncanakan akan selesai masa kerjanya pada bulan Juni 1983, tetapi kemudian diperpanjang sampai bulan Juli 1984.

Tujuannya adalah, untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I NTB dan NTT, untuk mengembangkan potensi pembangunan dan formulasi program serta proyek-proyek yang spesifik, mempunyai prioritas tinggi dan bersifat segera untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Proyek ini pula mempunyai tujuan khusus yaitu :

a Memantapkan Strategi pembangunan secara menyeluruh untuk propinsi NTB - NTT.
b Mengintensifikasikan dan merumuskan program-program dan proyek-proyek pembangunan terpadu.
c Mengembangkan proyek-proyek investasi di Daerah yang tinggi tingkat prioritasnya dan bersifat khas seperti pertanian, perikanan rakyat, peternakan, kerajinan tangan, pembangunan prasarana fisik dan sosial, reboisasi, program penghijauan dan konservasi tanah, pengadaan air, pengembangan desa terpadu dan lain sebagainya.

USAID (PDP).

Dalam rangka meningkatkan laju pembangunan di Daerah, maka di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1980/1981 telah mulai dilaksanakan program Pengembangan Wilayah dengan dana APBN yang dikaitkan dengan bantuan Luar Negeri yaitu USAID. Program Pengembangan Wilayah pada tahap I ini berlangsung selama 4 tahun dimulai tahun 1980/1981 dan berakhir pada tahun 1983/1984 yang dilaksanakan pada 3 Kabupaten yaitu, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

Melalui Program Pengembangan Wilayah ini disediakan dana untuk membiayai pembangunan proyek-proyek dan pemberian kredit dengan tujuan :

a Meningkatkan secara langsung pendapatan/kesejahteraan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah di daerah minus/kritis atau daerah yang belum berkembang dalam rangka peningkatan keselarasan laju pembangunan yang selama ini belum cukup ditangani melalui program atau proyek yang dibiayai dengan dana APBN atau APBD.
b Menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan Administrasi bagi :
    1 Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II terutama Bappeda, dalam tehnik dan Organisasi perencanaan, pelaksanaan/implementasi, sistim pelaporan dan pengendalian proyek-proyek pembangunan.
    2 Dinas dan Instansi tertentu yang mempunyai peranan penting di dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah.

Pelaksanaan

Tahun 1980/1981 untuk program Pengembangan wilayah mulai dilaksanakan di Daerah Tingkat I NTB. Tahun anggaran 1980/1981 berlokasi pada 3 Kabupaten yaitu : Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa, meliputi 10 Kecamatan dengan 59 desa. Untuk tahun pertama (1980/1981) disediakan dana sebesar Rp600.000.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 14 buah proyek dengan Dana sebesar Rp416.810.000,- dan sisanya sebesar Rp183.190.000,- disalurkan untuk kredit. Realisasi pelaksanaan proyek-proyek tahun 1980/1981 telah selesai 100% dan pada umumnya telah berfungsi.

Pada tahun 1981/1982 untuk tahun kedua pelaksanaannya tetap pada 3 kabupaten, tetapi jumlah kecamatan maupun desanya bertam-

1. Development Plan and Executive Summary.

2. Technical Report, which consists of :

a. Climate report
b. Hidrology report.
c. Soil and Land Use.
d. Topographic Survey
e. Groundwater report.
f. Watershed/reservoir Development Studies.
g. Irrigation studies.
h. Agronomy report
i. Livestock.
j. Econonic report.
k. Fisheries studies
l. Geotechnical Investigations.

World Bank (PPIPD)

The complete name of PPIPD NTB–NTT project is Regional Planning and Preparation of Investment-oriented Projects in NTB–NTT. This project (INS/78/046) is technical assistance project, financed by UNDP (United Nations Development Programme), administeret by World Bank. The project was a continuation of the East Indonesian Regional Development Study (EIRDS), which was executed by CIDA (Canadian International Development Agency). The project was originally scheduled to be completed in June 1983, however it was extended till July 1984. The objective of the project was to expand the development potential, formulation of specific programme or project which have high priority or urgency to fulfil the need for development.

This project has special purpose, i.e. :

a. To stabilize development strategy for the entire province of NTB (West Nusa Tenggara) and NTT (East Nusa Tenggara).
b. To intensify and formulate integrated development programme and projects.
c. To develop investment projects in the regions with high degree of priority and have typical characteristics such as agriculture, fishery, animal husbandry, handicrafts, development of social and physical infra-structure, reforestation, regreening and land conservation, supply of water, integrated village development, etc.

U S A I D (PDP)

In the effort of increasing the rate of development in the region the province of NTB (West Nusa Tenggara) since 1981/1982 has been implementing regional development program with fund from State Budget in relation to the foreign assistance, namely USAID. Regional Development Programme in this first phase for 4 years, started from 1980/1981 and ended in 1983/1984 which was implemented in three districts, namely Central Lombok, East Lombok and Sumbawa. Through Regional Development Programme fund was provided to finance development projects and the provision of credit with the purpose :

a. To improve revenue/welfare of the low income group in the critical/minus regions or undeveloped regions in the effort of increasing the rate of development, in which these regions have not been touched by programme or project financed by State Budget or Regional State Budget.
b. To improve administrative ability for :
1. Provincial and District levels of government particularly Regional Planning Board (Bappeda), in the field of technical and organizational planning, implementation, reporting system, and control of development projects.
2. Some vertical institutions which have important role in the effort of increasing revenue of the low-income group in the village.

Implementation

In 1980/1981 regional development programme started to be implemented in the province of NTB (West Nusa Tenggara). In the Budget Year 1980/1981 the programme were located at three districs, namely the disticts of central Lombok, East Lombok and Sumbawa, comprising of 10 Sub-Districts with 59 villages. For the first year (1980/1981) the fund provided for this programme was Rp600,000,000,- which was allocated to finance 14 projects with fund ammounted to Rp416,800,000,-, and the remaining funds amounted to Rp183,190,000,- was distributed for credit. The implementation of projects in 1980/1981 have been fully completed and mostly have functioned properly.

In 1981/1982 for the second year of implementation, the projects remained to the 3 districts, however the number of Sub-districts or villages were increased to be 22 Sub-Districts comprising of 87 villages. For the second year the fund provided for these projects amounted to Rp745,500,000,- which

bah yaitu menjadi 22 kecamatan yang meliputi 87 desa. Pada tahun kedua ini disediakan dana sebesar Rp745.500.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 35 buah proyek dengan dana Rp692.128.150,- dan selebihnya sebesar Rp53.371.850,- disalurkan untuk kredit.

Tahun 1982/1983 untuk tahun ketiga pelaksanaannya tetap pada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa, yang meliputi 25 kecamatan dan 117 desa yang terdapat pada 3 kabupaten tersebut. Pada tahun ke-3 ini (1982/1983) disediakan dana sebesar Rp750.000.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 21 proyek dengan dana Rp648.553.010,- sedangkan selebihnya sebesar Rp101.446.990,- disalurkan untuk kredit.

Tahun 1983/1984 untuk tahun terakhir tahap I ini palaksanaannya lebih ditekankan kepada pemantapan proyek-proyek tahun sebelumnya dan lokasi tetap seperti semula yakni meliputi 25 kecamatan dan 117 desa. Adapun dana yang disediakan pada tahun 1983/1984 sejumlah Rp171.000.000 dialokasikan untuk membiayai 25 proyek dengan dana Rp648.374.450,- dan selebihnya untuk kredit sejumlah Rp68.625.550,-.

Sekolah dan Air Bersih (CARE)

Kerja sama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan CARE Indonesia telah dimulai sejak tahun 1977 yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian antara Departemen Dalam Negeri dengan Care Indonesia tanggal 6 Mei 1978 sampai tahun 1983 dan telah ditandatangani 8 (delapan) perjanjian program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Secara Operasional pelaksanaan proyek dalam rangka kerja sama tersebut dikelola oleh Care sendiri dengan pengawasan oleh Team Kerja yang dari Instansi tehnis dari Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Untuk pembiayaannya disamping dari dana Care juga disediakan dana dari APBD yang timbangan prosentasenya setiap tahun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka perjanjian program adalah sebagai berikut:

- Tahun 1977 telah dilaksanakan pembangunan 500 unit rumah yang rusak akibat bencana alam di Lombok Timur dengan biaya sebesar Rp88.455.575,- terdiri dari biaya Pemerintah Daerah sebesar Rp40.955.575,- dan biaya Care sebesar Rp37.500.000,-.
- Tahun 1978 telah dilaksanakan pembangunan/rehabilitasi sekolah Dasar Non Inpres sebanyak 13 unit yang dilengkapi dengan peralatan masing-masing Lombok Barat 6 unit, Lombok Tengah 4 unit dan Lombok Timur 3 unit dengan pembiayaan sebesar Rp72.500.000,- Pembiayaan tersebut terdiri dari dana Pemerintah Daerah Rp22.500.000 dan dana Care sebesar Rp50.000.000,-.
- Tahun 1979 dilaksanakan pembangunan Air Minum bersih dengan sistem perpipaan sepanjang 4 Km di Belanting (Lombok Barat) dengan dana sepenuhnya dari Care sebesar Rp17.000.000,-.

Di samping itu telah dilaksanakan pula pembangunan 1 unit sekolah Luar Biasa di Mataram dengan biaya sebesar Rp14.448.750 terdiri dari dana Pemerintah Daerah Rp4.650.000,- dan dana Care Rp9.798.750,-.

Dalam tahun yang sama telah dilaksanakan pula program pembangunan Masyarakat Desa di Lombok Barat, Lombok Timur, Bima dan Dompu. Kegiatan tersebut meliputi pembangunan Perpipaan air minum 6 unit SPT dangkal 180 unit, pengadaan sapi bibit 5 paket, pengadaan bibit tanaman pekarangan dan penyuluhan gizi. Pembiayaan terdiri dari dana Pemerintah Daerah Rp17.000.000,- dan dana Care Rp74.551.000,-.

Di samping program tersebut dalam tahun 1979 telah dilaksanakan Program pengembangan Daerah Resettlement di Lombok Barat, Lombok Timur, Bima dan Dompu. Kegiatan tersebut meliputi Pembangunan Perpipaan air minum 3 unit, SPT dangkal 10 buah, Pembuatan Jalan Desa 7 Km, Pembangunan SD non Inpres 3 unit, dan pengadaan bibit tanaman pekarangan dengan biaya sebesar Rp105.076.000,- Pembiayaan tersebut terdiri dari dana Pemerintah Daerah Rp20.000.000,- dan dana Care Rp85.076.000,-.

- Tahun 1981 dilaksanakan program pembangunan Masyarakat desa dan Pengembangan daerah pemukiman kembali penduduk di Lombok Barat, Lombok Timur, Bima dan Dompu yang meliputi kegiatan-kegiatan Pembangunan perpipaan air minum 3 unit, SPT Dalam 3 unit, SPT dangkal 11 unit, pengadaan sapi bibit 6 paket pembuatan jalan desa 4 Km, dan pencetakan Sawah dengan biaya Rp209.533.855,- terdiri dari dana Pemerintah daerah Rp81.818.615,- dan dana Care sebesar Rp125.715.240,-
- Tahun 1982 dilaksanakan pula pembangunan perpipaan 7 unit, SPT dangkal 11 unit, SPT dalam 30 unit, jalan Desa 4 Km dan sanitasi lingkungan 7 buah. Kegiatan tersebut tersebar di Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu dan Bima dengan biaya sebesar Rp137.339.800,- terdiri dari dana Pemerintah Daerah Rp68.669.900,- dan dana Care Rp68.669.900,-.

was allocated to finance 35 projects with the amount of fund was Rp692,128,150,-, and the rest totalled Rp53,371,850 was distributed for credit.

In 1982/1983 for the third year, the implementation remained to the 3 districts namely Central Lombok, East Lombok, and Sumbawa comprising of 25 Sub-districts and 117 villages. For the third year (1982/1983) the provision of fund was Rp750,000,000,- which was allocated to finance 21 projects with the fund amounted to Rp648,553,010,- and the remaining fund totalled Rp101,446,990,- was distributed for credit.

In 1983/1984 for the last year of the first phase, the emphasis was given to the implementation of projects of the previous years with the same location comprising of 25 districts and 117 villages. The fund provided for the year 1983/1984 totalled Rp171,000,000 which was allocated to finance 25 projects with fund totalled Rp648,374,450,- and the remaining fund for credit amounted to Rp68,625,550,-.

School And Clean Water (Care).

Cooperation between Provincial Government of West Nusa Tenggara with CARE Indonesia has been started since 1977 which was a follow up of an agreement between Departement of Home Affairs with CARE Indonesia, dated 6th May 1978 up to 1983 in which has been signed 8 agreements in the frame work of increasing social welfare particularly for the rural community. The implementation of the projects was administered by CARE itself with supervision of Working Team consisting of technical institutions from provincial level, districts and Sub-districts.

For the financing besides the fund provided by CARE the project received fund from Regional Budget with proportion of annual percentage based on the agreement of the two parties.

Activities that have been carried out in the framework of the agreement program are :

- *In 1977 500 housing were rebuilt. The houses were damaged due to natural disaster in East Lombok. The cost required to rebuild the houses was Rp88,455,575 consisting of the financing from regional government totalled Rp40,955,575,- and the financing from CARE amounted to Rp37,500,000,-*
- *In 1978 Non-inpres aid for the construction/rehabilitation of Elementary School which school equipment were also provided. The number of school were 13 units. In West Lombok 6 units, Central Lombok 4 units, and East Lombok : 3 units. The financing for this projects was Rp72,500,000,- consisting of the fund from regional government totalled Rp22,500,000,- and the fund from CARE amounted to Rp50,000,000,-*
- *In 1979 Construction of drinking water installation by using water pipe system. The pipe was 4 Km long, in Belanting (West Lombok) with the whole fund from CARE which amounted to Rp17,000,000,-*

One unit school for the handicap in Mataram with the cost totalled Rp14,448,750 consisting of the fund from Regional Government amounted to Rp4,650,000,- and the fund provided by CARE totalled Rp9,798,750,- In the same year rural community development program was also carried out in West Lombok, East Lombok, Bima and Dompu. These activities covering the construction of 3 unit drinking water pipe, 10 units shallow SPT, the construction of 7 Km rural road, the construction of 3 units elementary school building (non-inpres), and the supply of seedling for garden plants, with the total cost of Rp105,076,000. The financing consisted of the fund from the regional government totalled Rp20,000,000,- and fund from CARE amounted to Rp85,076,000,-

In 1981 rural community development program and resettlement program was carried out in West Lombok, East Lombok, Bima and Dompu covering the following activities : the construction of 3 unit water pipe, 3 units of deep SPT, 11 units of shallow SPT, the supply of cows (for the breeding of cows), 6 packages for the construction of 4 km rural road.

and the opening of rice fields with the cost of Rp209,533,855 consisting of the funds from the local government amounted to Rp81,818,615,- and the funds from CARE amounted to Rp125,715,240,-

- *In 1982 some activities were carried out covering 7 units pipe construction, 11 units shallow SPT, 30 units deept SPT, rural road construction 4 km, sanitation of the environment 7 units. These activities were scattered in West Lombok, East Lombok, Dompu and Bima with the cost of Rp137,339,800,- consisting of the funds from the local government amounted to Rp68,669,900,- and the funds from CARE - totalled Rp68,669,900,-.*
- *Activities in 1983 include the construction of 9 units of piping networks, 20 units of manual pumps, the planting of Lamtoro Gung to preserve agricultural land and flood prevention. These activities are dispersed in West Lombok, Dompu and Bima, financed by funds from the Goverment (Rp79,000,000) and CARE (Rp79,000,000).*

- Tahun 1983 dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan perpipaan 9 unit, Pembangunan SPT 20 unit dan Pembangunan Tanaman Lamtoro Gung untuk sistim pertanian dan pencegahan Erosi. Kegiatan tersebut tersebar di Lombok Barat, Dompu dan Bima dengan rencana biaya masing-masing dana Pemerintah Daerah Rp79.000.000,- dana Care Rp79.000.000,-.

Koperasi (SWISS)

Kegiatan Proyek QTA-39 ini dilaksanakan berdasarkan Memorandum Of Understanding antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss yang ditandatangani tanggal 22 Nopember 1979. Menurut memorandum proyek kerja sama tersebut berlangsung selama 2 tahun yaitu tahun 1980 dan 1981. Berdasarkan persetujuan kedua Negara mengingat dalam masa 2 tahun pertama tersebut proyek baru mencapai tingkat persiapan dan mencari kebijaksanaan yang akan dilaksanakan, maka proyek dalam memorandum tahap I diperpanjang 1 tahun yakni tahun 1982.

Sesuai dengan hasil penilaian bahwa proyek masih perlu diteruskan, maka dibuatlah memorandum tahap II yang berlaku dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 (3 tahun). Proyek kerja sama tersebut bertujuan :

1 Memperkuat beberapa Koperasi (KUD) pilot Proyek Kabupaten Lombok Tengah, membantu mereka agar menjadi KUD model sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah R.I.
2 Melaksanakan desentralisasi Koperasi dan membimbing Koperasi untuk membentuk Kelompok Keanggotaan melalui cara pelayanan yang dilakukan oleh TKP (Tempat Pelayanan Koperasi).
3 Membangkitkan perasaan bertanggung jawab atas diri para anggota Koperasi terhadap Koperasi (KUD/TPK) mereka, memberikan motivasi kepada mereka tentang cita-cita yang dikandung dalam Koperasi dan menciptakan suasana persaudaraan berusaha dan berkepercayaan terhadap diri sendiri.
4 Menambah kegiatan-kegiatan Koperasi (tehnologi sederhana dan lain-lain/serta memberikan lapangan kerja dan kesempatan kerja.
5 Memberikan atau menyampaikan hasil-hasil, memberikan saran-saran program-program keahlian, latihan dan bahan-bahan informasi melalui percontohan-percontohan latihan dan penyuluhan kepada Instansi-instansi/Badan-badan yang manaruh minat/tertarik di daerah Lombok Tengah.

11. Agraria

Kegiatan di bidang pertanahan pada dasarnya dititikberatkan pada usaha-usaha menertibkan status dan penggunaan tanah, meningkatkan pemberian kepasitian hukum dan hak atas tanah serta usaha-usaha lain untuk mencegah terjadinya keresahan sosial dikalangan masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari keberhasilan usaha-usaha tersebut adalah adanya pemerataan atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah.

Dalam rangka mengembangkan usaha-usaha tersebut, maka langkah-langkah yang telah dilakukan adalah mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan Panitia Pertimbangan Landreform baik pada tingkat Propinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Penertiban pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan percepatan kegiatan pemberian kepastian hak atas tanah. Dalam hubungan ini telah diselesaikan pemberian sertifikat tanah pada lokasi resetlement sebanyak 1.956 sertifikat dan sertifikat Prona sebanyak 11.809 sertifikat.

Usaha-usaha lain yang berkaitan dengan masalah Pertahanan antara lain penertiban Surat Keputusan Pemerintah Hak sebanyak 5.689 subyek hak retribusi tanah, obyek Landreform seluas 57.482 Ha kepada petani penggarap, pembuat peta dasar tehnis 12.983 Ha, pembuatan peta situasi 12.975 Ha, pembuatan peta pendaftaran tanah 6.450 Ha, pembukaan Hak, 5.325 persil, pemetaan penggunaan detail 488.300 Ha, pemetaan kemampuan tanah 1.103 Ha, dan pemetaan pada 12 kota Kecamatan. Di samping itu dalam rangka transmigrasi lokal yang dikaitkan dengan pengembangan perkebunan inti rakyat telah juga dilakukan pemetaan penggunaan tanah dan pemetaan topografi seluas 8.180 Ha. Untuk kepentingan yang sama telah selesai dilakukan pengukuran keliling seluas 3.600 Ha, pengkaplingan tanah pekarangan 245 kapling, tanah usaha pangan 245 kapling dan pengkaplingan lahan usaha plasma 604 kapling.

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA)

Sebagaimana dimaklumi maksud utama diadakan Proyek Operasi Nasional Agraria adalah disamping untuk mengurangi kerawanan di bidang pertahanan juga untuk memantapkan pelaksanaan landreform dengan mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai dan menunjang usaha-usaha pengendalian dan pengawasan pemilikan tanah yang dirasakan sebagai masalah yang dapat mengganggu stabilitas sosial

Cooperative. (Switzerland)

Activities of QTA – 39 project was carried out based on Memorandum of Understanding between the government of Indonesia and the government of Switzerland signed on 22 November 1979. According to the Memorandum, the cooperation project lasted for 2 years, from 1980 to 1981. Based on the agreement between the two countries considering that during the first two years the preliminary stage and in order to get the right policy to be implemented, the project of the memorandum for the first phase was extended for one year till 1982.

According to the evaluation that the project should be continued, the memorandum for the second phase was made which lasted from 1983 to 1985 (3 years). The purpose of this cooperation project were :

1. *To strengthen some cooperatives (KUD : Rural Cooperative), Pilot project in Central Lombok district, to assist them to be model of KUD in accordance with the policy of the government of the Republic of Indonesia.*
2. *To implement decentralized cooperatives and to guide cooperatives to organize membership through services provided by TPK (Cooperatives service station).*
3. *To increase sense of responsibility for cooperatives members to their cooperatives, to give motivation to them about the ideal of cooperatives and to create good climate for doing business as well as creating self considence.*
4. *To increase cooperatives activities (simple technology etc.) and to provide employment opportunities.*
5. *To provide the results, to give suggestions on programme of skill, training and information through providing examples, and information to the institutions which are interested in cooperatives in Central Lombok.*

11. Agraria (Agrarian Affairs)

Activities in the field of land are basically focused on the efforts to arrange the status and the use of land, and the provision of legal right on land, also other efforts to prevent unrest in the community. The benefit felt by community of the success of these efforts were the equitable source of livelihood for the farmers in the form of land.

In the framework of developing these efforts steps have been taken to reactivate the activities of landreform committee, either in the provincial level or district level. The arrangement for the implementation of sharing agreement and to speed up the process of acquiring the right on land. In this connection certificates have been given in the resettlement location totalled 1,956 certificates and 11,809 PRONA (Agrarian Special Service) certificates.

Other efforts related to the land problems are among others : the arrangement of providing certificates, totalled 5,689 subject of right on land restribution, object of landreform of 57,482 Ha to the farmers who cultivate the land, preparation for basic technical mapping of 12,983 Ha, preparation of situation map of 12,975 Ha, preparation for land registration map of 6,450 Ha, 5,325 plot of land, the mapping of detail use of 488,300 Ha, the mapping of land 1,103 Ha, and the mapping of 12 Sub-districts. Moreover in the framework of local transmigration related to the development of small holder's nucleus estates the mapping of land use and topography mapping of 8,180 have also been carried out. For the same pupose the measurement of 3,600 Ha of land have been completed, the plotting of 245 plots of garden, the cultivated land of 245 plots and the plotting of cultivated land for plasme? of 604 plots.

PRONA *(Proyek Operasi Nasional Agraria) Agrarian Special Service*

It has been understood that the main purpose of Agrarian Special Service is not only to reduce land problems but also to smoothen the implementation of land reform, to secure the results that have been achieved and to support efforts to control land ownership. This is considered to a crucial problem that can disturb social and political stability.

By starting Agrarian Special Service the land owners will feel more secure to make use of their lands, particularly for those owners who arec classified as puny economic group.

After passing through the implementation phase the kind of activities for the arrangement of land certificate would be the provision of right in the framework of redistribution of land as the object of landreform. Provision of right on state-owned land. Confirmation of right on inherited land. and conversion on inherited land.

The kind of activities for the settlements of land problems can be distinguished : the problems between government institutions; between government institution and community, and among the members of community. In regard to the realization of PRONA, the results have been achieved satisfactorily. It is evident from the areas of implementation. The plan to issue of about 9,100 land certificates, and it turned out that the realization reached 11,569

politik.

Dengan dilancarkannya proyek-proyek Nasional Agraria, para pemilik tanah akan merasa lebih aman dan tentram dalam mengusahakan serta memanfaatkan tanahnya khususnya bagi pemilik tanah golongan ekonomi lemah.

Setelah melalui proses pentahapan pelaksanaannya maka jenis kegiatan dalam rangka penertiban sertifikat tanah dapat dikatakan antara lain: Pemberian hak dalam rangka redistribusi atas tanah-tanah yang menjadi obyek landreform; Pemberian hak atas tanah negara; Penegasan hak atas tanah adat; dan Konversi atas tanah-tanah milik adat.

Sedangkan jenis kegiatan penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan antara lain : antara instansi pemerintah; antara instansi pemerintah dengan masyarakat dan antara anggota-anggota masyarakat.

Selanjutnya mengenai realisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh PRONA, dapat dikatakan cukup memuaskan terbukti pada areal pelaksanaannya: rencana penerbitan Sertifikat tanah sekitar 9.100 buah, ternyata realisasinya mencapai sebanyak 11.569 buah.

Hasil-hasil lain yang telah dicapai antara lain : dalam Pelita II Sertifikat tanah yang dapat diterbitkan sejumlah 5.194 buah dan dalam Pelita III, Sertifikat tanah yang dapat diterbitkan sejumlah 25.441 buah.

Dalam Pelita III telah diselesaikan pemberian sertifikat tanah pada lokasi resettlement sebanyak 2.093 sertifikat dan PRONA sebanyak 26.869 sertifikat. Usaha-usaha lain di bidang pertanahan selama Pelita III adalah penerbitan sebanyak 3.404 subyek hak, pembuatan peta pendaftaran tanah 12.886,99 Ha, pemetaan kemampuan tanah 1.069.200 Ha, pemetaan penggunaan detail 793.800 Ha redistribusi tanah obyek landreform sampai akhir Pelita III seluas 25.294,497 Ha kepada 17.965 petani penggarap.

12. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Keikutsertaan wanita dalam lembaga-lembaga di desa di seluruh wilayah NTB masih terbatas, umumnya belum melibatkan semua potensi wanita yang ada di daerah tersebut. Di samping masih adanya anggapan bahwa wanita tidak mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan di dalam maupun di luar rumah tangganya.

Sedangkan Gerakan PKK dengan 10 program pokoknya sudah dapat dilaksanakan di semua desa di Nusa Tenggara Barat walaupun belum secara keseluruhan. Dalam tahun 1979/1980 jumlah kader PKK yang dibina di daerah Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.440 orang, tahun 1980/1981 juga 1.440 orang, tahun 1981/1982 sebanyak 1.128 orang, tahun 1982/1983 sebanyak 720 orang, dan dalam tahun 1983/1984 sebanyak 720 orang. Jumlah keseluruhan kader PKK di seluruh Nusa Tenggara Barat dalam tahun 1979/1980 hingga tahun 1983/1984 adalah sebanyak 5.448 orang. Kader-kader PKK di daerah ini dimaksudkan untuk menunjang program P2WKKS yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat.

PKK merupakan suatu gerakan untuk menghimpun, membina dan mengarahkan kegiatan wanita guna mencapai dan mewujudkan keluarga sejahtera. Di Nusa Tenggara Barat telah terbentuk banyak kader-kader PKK dari daerah tingkat II hingga keseluruh pelosok pedesaan.

Sedangkan untuk 10 program PKK yang terdiri dari : (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; (2) Gotong royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; (6) Pendidikan dan keterampilan; (7) Kesehatan; (8) Mengembangkan kehidupan berkoperasi; (9) Kelestarian lingkungan hidup; dan (10) Perencanaan sehat. Kesepuluh program PKK tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling berkait, umumnya sudah dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk kegiatan P2WKSS di daerah ini telah dilaksanakan melalui jalur kegiatan fungsional PKK dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan rapat kerja daerah P2WKSS Tingkat I Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya dengan menghasilkan rumusan Rakerda dan kegiatan P2WKSS diterapkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. (2) Penetapan lokasi desa Proyek P2WKSS setiap tahunnya. (3) Melaksanakan tanaman pekarangan dan aneka usaha tani, pemugaran perumahan dan tata lingkungan desa. (4) Penyuluhan kesehatan masyarakat, jamban keluarga, air bersih, pembuatan lubang untuk sampah, tempat jemuran dan sebagainya. (5) Melaksanakan kursus-kursus ketrampilan kursus Paket A. (6) Penyuluhan Taman Gizi. (7) Membentuk usaha koperasi dan (8) Memantapkan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

Pelaksanaan Program PKK

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program PKK yang meliputi bidang P4 dan Gotong Royong diantaranya penataran P4 bagi kaum wanita pola 45 jam, pola pendukung 25 jam, pola pendukung

certificates. Other results that have been achieved were among others : For the second Five Year Development Plan 5,194 land certificates were as issued whereas for the Third Five Year Development Plan 25,441 certificates were issued. In the Third Five Year Development Plan 2,093 certificates were issued in the resettlement location, whereas for PRONA (Agrian Special Service) 26,869 certificates. Other efforts concerning land that during the Third Five Year Development Plan 3,404 subject of right were issued, the mapping of registration land of 12,886,99 Ha, the mapping of 1,069,200 Ha of land, the mapping of detail use of 793,800 Ha, redistribution of land object of landreform till the end of the Third Five Year Development Plan of 25,294,497 Ha for 17,965 farmers who cultivate the land.

12. PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) Family Welfare Promotion

Participation of women in the institutions throughout West Nusa Tenggara is still limited. Generally they are not involved in all women potential in this area. Furthermore people thought that women still have no role in the decision making process either inside or outside their families.

Family welfare promotion movement with its 10 main programs has been able to be implemented in most villages in West Nusa Tenggara. In 1979/1980 the number of trainees to be upgraded in West Nusa Tenggara was 1,440 persons; in 1980/1981 the number was still the same. In 1981/1982 the number was 1,128 persons. In 1982/'83 was 720 persons, and in 1983/1984 the number was still unchanged. The total number of PKK cadres throughout West Nusa Tenggara from 1979/1980 to 1983/1984 was 5,488 persons. PKK Cadres in these areas were intended to support P2WKKSS (Promotion of Women's Role for a healthy and prosperous family) programe which has been stated by the Central Government.

PKK is a movement to gather, to give guidance, and to direct women activities in order to achieve family welfare. In West Nusa Tenggara many of the PKK cadres have been formed from district level to all over villages.

The 10 PKK programmes consist of : 1. Enlightenment and Application of Pancasila, 2. Mutual assistance (gotong royong); 3. Food 4. Clothing 5. Housing and household arrangement 6. Education and skill 7. Health 8. To develop cooperatives in the community. 9. Conservation of environment and 10. Healthy planning. The ten PKK programmes above form a unity and each programme relates to one another.

As for P2WKSS activities in this area have been carried out through PKK functional activities as follows :

1. To carry out regional meeting of P2WKSS of the province of West Nusa Tenggara every year and produce formulation of the meeting and P2WKSS activities which can be applied to the conditions of the respective regions. 2. Determination of village location of P2WKSS projects annually. 3. To carry out the planting of the garden and various farming activities, renewal of housing and rural environment. 4. To provide information on public health, family toilet, clean water, the making of hole in the ground for garbage disposal etc. 5. To carry out courses for improving skill, "A Package" course 6. To provide information on nutrition 7. To set up cooperatives and 8. To Support the implementation of marriage laws.

The implementation of PKK programme

The results that have been achieved in the implementation programme of PKK (Family Welfare Promotion) covering Guide to Enlightenment and Application of Pancasila and mutual assistance (gotong royong). P4 upgrading would include upgrading for women using 45 hour system, 25 hour system and 17 system. Upgrading course for the facilitator of simulation game and the establishment of P4 simulation group. Information and guidance have also been provided to develop activities to stimulate "mutual assistance" in rural areas in order to support the implementation of PKK programmes.

In the field of education and skill as well as cooperatives, the activities are as follows :

- *a. Training in the framework of improving knowledge of the administrator/team who is in charge of undertaking the organization (PKK) either at the village level (lowest administrative unit in rural area) "kelurahan" level (Lowest administrative unit in urban area), Sub-District, District and Provincial level.*
- *b. Implementation of varous technical training in cooperation with various institutions which support the implementation of PKK programmes, namely courses on health, nutrition, family planning administration, study group on "A" package etc.*
- *c. In the field of cooperative training on cooperatives have been provided in some districts.*
- *d. Motivation and information on cooperatives to be provided by team who is in charge of undertaking the organization (PKK).*

17 jam, penataran bagi fasilisator permainan simulasi dan pembentukan kelompok simulasi P4. Sedang di bidang gotong royong telah diberikan berbagai pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan gotong royong di tingkat desa guna menunjang pelaksanaan program-program PKK.

Di bidang pendidikan dan ketrampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi kegiatannya adalah sebagai berikut : (a) Pelaksanaan latihan dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi pengurus/tim penggerak PKK baik pada tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan, kabupaten dan di tingkat Propinsi; (b) pelaksanaan berbagai latihan teknis bekerjasama dengan berbagai instansi sektoral yang mendukung pelaksanaan program PKK yaitu : kursus kesehatan, gizi, pengelola KB, kejar Paket A dan lain-lain; (c) di bidang perkoperasian telah dilaksanakan latihan perkoperasian di beberapa kabupaten; (d) disamping diberikan motivasi dan penyuluhan perkoperasian yang dilakukan oleh tim penggerak PKK.

Disamping itu di Nusa Tenggara Barat, untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan PKK yang bersifat penyuluhan dan motivasi, dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga masyarakat terutama kaum wanita di dalam menggunakan sandang, pangan dan pengaturan tata laksana rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, dilakukan upaya pemberian motivasi dan penyuluhan diberikan melalui poster; leaflet, brosur dan lain-lain sebagainya.

In West Nusa Tenggara in order to smoothen PKK activities which are informative and motivational in nature, and to make people understand particularly for the women in the use of clothing, food, and household arrangements according to the values in Indonesia. Motivation and information are also provided through posters, leaflets, brochures etc.

As for PKK activities covering health, leaflets, conservation of environment, and health planning have been given great emphasis in West Nusa Tenggara. In the field of health some activities are also carried out, such us the improvement of family nutrition, information on nutritious food/healthy food and the establishment of POSYANDU (Integrated Serviced Station).

Sedang pelaksanaan kegiatan PKK yang meliputi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat di Nusa Tenggara Barat mendapat penekanan pokok. Untuk kegiatan di bidang kesehatan, dilakukan berbagai upaya seperti usaha perbaikan gizi keluarga, penyuluhan tentang kesehatan gizi serta pembentukan pos-pos pelayanan terpadu (Posyandu).

B A B / *CHAPTER III*

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI / *ECONOMI DEVELOPMENT*

POLA Dasar Pembangunan Daerah Jangka Panjang Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 9 tahun 1979. Selanjutnya Repelita III Daerah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No 250 II/1979.

Dengan ditetapkannya berbagai landasan perencanaan pembangunan Daerah di atas maka gerak laju pembangunan terkendali dengan baik dalam arti adanya sinkronisasi dengan gerak dan laju pembangunan Nasional seperti yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara serta langkah penjabarannya dalam Repelita Nasional. Di lain pihak teramatinya secara baik potensi-potensi yang tersedia dalam Daerah sendiri sehingga dapat dijamin adanya keserasian perkembangan daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Penetapan kebijasanaan perencanaan pembanguan daerah dilandasi dengan pengkajian yang mendalam tentang potensi alam dan manusia tersebut dimaksud untuk dikembangkan dalam rangka mengejar ambisi rakyat yakni ambisi pembangunan secara bertahap melalui pola-pola pemikiran sebagaimana tertuang dalam Pola Dasar dan Repelita Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN dan Repelita Nasional.

Dalam usaha mengembangkan potensi-potensi ini disadari adanya hambatan-hambatan seperti :

1 Tingkat ketrampilan penduduk rendah.
2 Mobilitas penduduk rendah.
3 Investasi swasta belum berkembang.
4 Tata guna tanah dan kemampuan daya tampung tanah yang belum pasti.
5 Iklim dan letak daerah yang kurang menunjang.
6 Penyebaran penduduk yang kurang merata dan pertumbuhannya cukup tinggi.
7 Pemilikan tanah rata-rata sempit; tidak meratanya tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah khususnya antara sektor pertanian dan non pertanian.
8 Kondisi sumber alam dan lingkungan hidup yang semakin menurun daya dukungnya karena kerusakan hutan dan tanah.

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut maka strategi yang dipergunakan dalam rangka pengembangan potensi-potensi yang tersedia adalah :

1 Membagi wilayah NTB dalam 3 wilayah pembangunan.
2 Penyebaran penduduk yang seimbang dan merata.
3 Diversifikasi kegiatan penduduk, baik secara vertikal maupun secara horisontal.
4 Memproduksi tenaga kerja yang trampil dan sesuai pasaran kerja.
5 Pemanfaatan sumber daya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Salah satu strategi dalam usaha mengembangkan potensi yang dipunyai dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas adalah membagi wilayah administratip NTB, dalam 3 wilayah pembangunan :

1 Wilayah Pembangunan Pulau Lombok yan terdiri atas 3 Kabupaten dengan Pusatnya adalah Mataram, Cakranegara, Ampenan dan Sub Pusat adalah Praya dan Selong.

   Pada Wilayah Pembangunan Pulau Lombok kegiatan pembangunan dititikberatkan pada usaha pengembangan :
   - Bidang pertanian bahan pangan.
   - Industri
   - Perikanan
   - Pertambangan

2 Wilayah Pembangunan Sumbawa Barat yang terdiri atas 1 Kabupaten dengan Sub Pusatnya Sumbawa Besar, Alas dan Empang.

   Pada wilayah pembangunan ini kegiatan pembangunan dititikberatkan pada bidang :
   - Peternakan
   - Perkebunan
   - Pertanian pangan

3 Wilayah pembangunan Sumbawa Timur yang terdiri atas 2 Kabupaten dengan Sub Pusatnya Bima, Dompu, Tente dan Sape. Pada wilayah pembangunan ini kegiatan pembangunan dititikberatkan pada bidang :
   - Peternakan.
   - Tanaman keras.

BASIC Design of Long-Term Development of West Nusa Tenggara is stated in the Region Regulations No 9 of 1979. The Repelita III of the Region is issued with Decision Letter No 250.11/1979 of the Governor.

Foundation has been laid for planning of the regional development and the development movement will be remaining under control meaning that it will be sinchronized within the national development movement and progress which is reflected in the Guidelines on State Policy and the National Repelita. Potensial of the region has been well taken care in order to guarantee that the development of the region will be in line with the other.

The regional development planning policy is taken on basis of through investigation of the natural and human potential available in the region. The natural and human potential will be developed in order to achieve the people's ambition which is a gradual development through conceptual pattern as conceived in the Basic Design and Repelita of the Region, the Province of Nusa Tenggara Barat, which in fact is a reflection of Guidelines on State Policy and National Repelita.

The following obstacles are known to be faced when developing these potential, namely :

1. *low level of people's skill*
2. *low mobility of people*
3. *underdeveloped investment by private*
4. *uncertain land use and capacity*
5. *unfavourable climate and geography of the region*
6. *unequal distribution of population and high rate of growth*
7. *average small size land possession; uneven distribution of low income particularly amongst agricultural and non-agricultural sectors.*
8. *ever declining condition of nature and life environment due to forest and land damages.*

In order to overcome these obstacles the following strategy has been determined within the framework of the existing potential development :

1. *to divide NTB area into 3 development regions*
2. *to widespread population evenly*
3. *to diversify people's activities, vertically and horizontally*
4. *to produce skilled labour in accordance with prevailing market*
5. *to utilize nature at the same time also conserve life environment*

The strategy through which the available potential may be developed to achieve the objective of the development as mentioned above is to divide the administrative area of Nusa Tenggara Barat into three development regions, namely

1. *Lombok island development region consisting of three districts with respective centres such as Mataram, Cakranegara, Ampenan and the sub-centres namely Praya and Selong.*

The development efforts in Lombok island development region are concentrated on :
- *foodstuff production*
- *industry*
- *fisheries*
- *mining*

2. *West Sumbawa development region consisting of one district has the following sub-centres, namely Sumbawa Besar, Alas and Empang.*

   Development activities of this development region are concentrated on :
   - *livestock*
   - *plantation*
   - *foodstuff production*

3. *Sumbawa Timur development region consisting of two district has the following sub-centres, namely Bima, Dompu, Tente and Sape. Development activities are concentrated on :*
- *animal husbandry*
- *perennial crops*
- *onions*
- *beans*
- *salt industry*
- *mining*

The purpose of establishing development regin is

1. *to guarantee the widespreading of development activities in order to avoid overcontration of activity in one region*
2. *to guarantee harmonized and coordinated activities of development in region*

- Bawang.
- Kacang-kacangan.
- Industri penggaraman.
- Pertambangan.

Tujuan dari penetapan wilayah pembangunan ini adalah :

1. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan tersebar merata di seluruh daerah sehingga dapat dihindari terjadinya pemusatan kegiatan pembangunan yang berlebihan.
2. Untuk menjamin adanya keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan di daerah.
3 Memberikan arah kegiatan pembangunan kepada masyarakat pada umumnya dan pengusaha maupun aparatur Pemerintah pada khususnya.
4 Memperlancar/mempercepat laju pertumbuhan interland yang membawa pengaruh, terhadap lajunya pertumbuhan dari masing-masing wilayah pembangunan dengan harapan laju pertumbuhan masing-masing wilayah pembangunan tidak berbeda terlalu jauh.

Penetapan fungsi tiap-tiap wilayah dalam proses pembangunan adalah berdasarkan potensi dan sektoral yang menonjol yang dapat dikembangkan di wilayah pembangunan dengan tidak mengabaikan perkembangan potensi lainnya.

Anggaran dan Pendapatan

Pembiayaan pembangunan sebesar Rp7,5 milyard, dalam Pelita I, kemudian dalam Pelita II jumlah tersebut meningkat menjadi Rp65,5 milyard. Sedangkan jumlah dana pembangunan sampai dengan tahun keempat Repelita III adalah sejumlah Rp324,1 milyard. Berarti terjadi peningkatan 398% dari jumlah dana dalam Pelita II. Jika dilihat dari proyek, peningkatannya adalah sebagai berikut :

- Pelita I dengan dana Rp7,5 milyard, proyek yang dihasilkan sejumlah 9.408 buah.
- Pelita II dengan dana Rp65,5 milyard jumlah proyek yang dihasilkan sejumlah 13.439 buah.
- Pelita III dengan dana Rp313,2 milyard jumlah proyek yang dihasilkan s/d tahun kelima (terakhir) adalah sejumlah 46.213 buah proyek.

Untuk memberikan gambaran seperlunya tentang komposisi anggaran dalam satu tahun, disertakan uraian yang menyangkut tahun anggaran 1985/1986

Dalam tahun anggaran 1985/1986 kegiatan pembangunan sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dalam tahun 1985/1986 dana pembangunan yang tersedia dari berbagai sumber pembiayaan berjumlah Rp88,08 milyard, dibandingkan dengan dana pembangunan tahun 1984/1985 sebesar Rp80,05 milyard; berarti peningkatan sebesar : 10%. Keadaan ini disebabkan karena kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang pembiayaannya berasal dari berbagai sumber dana ditingkatkan, guna dapat mencapai pemerataan pembangunan di daerah-daerah.

Jumlah dana yang disediakan untuk pembiayaan pembangunan dalam periode tahun anggaran 1985/1986 sebesar Rp88,08 milyard terdiri dari :

- APBN Sektoral .... Rp45,12 milyard
- APBD Dati I .... Rp10,60 milyard
- Inpres Dati II .... Rp 3,84 milyard
- Inpres SD .... Rp19,11 milyard
- Inpres Penghijauan dan Reboisasi .... Rp 1,50 milyard
- Inpres Penunjangan Jalan .... Rp 2,27 milyard
- Inpres Sarana Kesehatan .... Rp 1,84 milyard
- Inpres Desa .... Rp 0,89 milyard
- APBD Dati II .... Rp 2,01 milyard
- PDP/USAID .... Rp 0,90 milyard

Selain dana yang berasal dari Pemerintah, dibidang pemupukan dana pihak ketiga (Instansi Swasta) telah terkumpul dana untuk pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Perbankan yang ada di Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Januari 1986, sebesar Rp43,98 milyard dalam bentuk Giro, Deposito, Tabungan dan lain-lain. Dalam tahun anggaran 1985/1986, pemupukan dana swasta untuk pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Perbankan mengalami kenaikan sebesar 37,5%, bila dibandingkan dengan tahun anggaran 1984/1985 yaitu sebesar Rp31,33 milyard.

Dalam tahun anggaran 1985/1986 jumlah anggaran APBD seluruhnya baik rutin maupun pembangunan adalah berimbang pada jumlah Rp27.853.437.107,- yang terdiri dari anggaran rutin sebesar Rp14.031.999.814,- dan anggaran pembangunan sebesar Rp13.821.437.293,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin tahun 1985/1986 adalah bersumber pada penerimaan dari Pemerintah dan/atau Instansi yang

3. to guide the development activities of the community, enterpreneurs and also government apparatus

4. to accelerate the growth rate of interland development which finally will effect the progress of each development region without leaving one region behind.

The function of each region in the development procees is based on the existing potential and prominent sector which may be development further without neglecting the other potential.

Budget and Revenues

The development expenditures amounting Rp7,5 billion during Pelita I was increase to become Rp65,5 billion during Pelita II. The development funds provided up to the fourth year of Pelita III amounted Rp324,1 billion meaning an increase by 398 % of the funds provided in Pelita II. The increase might be viewed project wise as follows :

- *Pelita I of which the funds provided was Rp7,5 billion has implemented 9.408 project*
- *Pelita II of which the funds amounted Rp65,5 billion has implemented 13.439 projects*
- *Pelita III of which the funds amounted Rp313,2 billion has implemented 46.213 projects as up to the fifth year.*

In order to describe the components of the budget in a year here below is the breakdown of 1985/1986 financial year budget.

During 1985/1986 financial year development activities increased in comparison to the previous year. Various sources have been able to provide Rp88,08 billion during 1985/1986 financial year in comparison to the 1984/1985 financial year whcih only provided Rp80,05 billion meaning an increase of 10%. The reason is that development activities in various sectors were increased following the greater funds available from various sources with the purpose of widespreading the development in the regions.

Funds provided for the development during 1985/1986 financial year amounting Rp88,08 are broken down into the following :

- *APBN Sectoral .... Rp45,12 billion*
- *APBD Province .... Rp10,60 billion*
- *Inpres Aid Distric .... Rp 3,84 billion*
- *Inpres Aid for Primary School .... Rp19,11 billion*
- *Inpres Aid for Regreening and Roforestation .... Rp 1,50 billion*
- *Inpres Air for Road Inprovement .... Rp 2,27 billion*
- *Inpres Air for Head Development .... Rp 1,84 billion*
- *Inpres Aid for Rural Development .... Rp 0,89 billion*
- *APBD District .... Rp 2,01 billion*
- *PDP/USAID .... Rp. 0,90 billion*

Beside the funds made available by the government, private sectors had been able to provide Rp43,98 billion in the form of Giro, Deposites, Savings etc. as up to January 31, 1986 through banks in Nusa Tenggara Barat. During 1985/1986 private sectors through banks had been able to collect more funds, an increase of 37,5% compared to Rp31,33 billion in 1984/1985.

Balanced budget, both for the routine expenditure and development, of the APBD in 1985/1986 amounting Rp27,853,437,107 was broken down into Rp14,031,999,814 for routine expenditure and Rp13,821,437,293 for development budget.

Revenue and Expenditure Budget for 1985/1986 was made available from the government and/or higher bodies amounting Rp11,117,208,843 of 80,43% where as the regional revenue has made available Rp2,894,228,450 or 19,57%. The routine expenditure of the budget for 1985/1986 meant for the civil servants salaries, purchase of material, maintenance cost, official travels, miscellanous purposes, pension funds, subsidy funds and others.

The development budget amounting Rp13,821,437,293 used for

- *agricultural and irrigation with the intention of increaseing the agricultural production and improvement of irrigation of which the funds amount Rp3,873,334,868 of 27,60% of the 1985/1986 development budget*
- *mining and energy which required Rp7,830,710 or 0,06%.*
- *communication and tourism requiring sum of Rp3,041,186,127 of 21,67%.*
- *trade and cooperatives which needed Rp73,522,175 or 0,52%*
- *manpower and settlement for which allocation is made amounting Rp39,491,500 of 0,28 %*
- *regional development with an allocation of Rp900,343,701 of 6,42%*
- *religious affairs with an amount of Rp165,216,588 of 1,18%*
- *education, young generation, national culture and belief in God Almighty with an allocation of Rp970,128,019 or 6,91%*
- *health, social welfare, women's role, population and family planning with an allocation of Rp810,771,648 or 5,83 %*

lebih tinggi sebesar Rp11.117.208.843,- atau 80,43% dan penerimaan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp2.894.228.450,- atau 19,57%. Sedangkan kebijaksanaan pengeluaran rutin dalam tahun anggaran 1985/1986 diarahkan untuk belanja Pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja lain-lain, belanja pensiunan, subsidi/Perimbangan keuangan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, serta pengeluaran tidak tersangka.

Anggaran pembangunan dengan dana sebesar Rp13.821.437.293,- dipergunakan untuk membiayai :

- Sektor Pertanian dan pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang didukung oleh peningkatan pelaksanaan irigasi yang memadai dengan biaya sebesar Rp3.873.334.868,- atau sekitar 27,60% dari jumlah anggaran pembangunan tahun 1985/1986.
- Sektor Pertambangan dan Energi dengan dana sebesar Rp7.830.710,- atau 0.06%.
- Sektor Perhubungan dan pariwisata dengan jumlah dana sebesar Rp3.041.186.127,- atau 21.67%.
- Sektor Perdagangan dan Koperasi dengan dana sebesar Rp73.522.175,- atau sekitar 0,52%.
- Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman dengan alokasi dana sebesar Rp39.491.500,- atau 0,28%.
- Sektor pembangunan Daerah dengan jumlah dana sebesar Rp900.343.701,- atau 6,42%.
- Sektor Agama dengan alokasi dana sebesar Rp165.216.588,- atau 1,18%.
- Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan dana sebesar Rp970.128.019,- atau sekitar 6,91%.
- Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan dana sebesar Rp810.771.648,- atau 5,83%.
- Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman dengan biaya sebesar Rp222.240.375,- atau 1,58%.
- Sektor Hukum disediakan dana sebesar Rp18.874.000,- atau 0,13% dari jumlah anggaran pembangunan 1985/1986.
- Sektor Keamanan dan Ketertiban dengan jumlah dana sebesar Rp260.735.685,- atau 1,86%.
- Sektor Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial dengan dana sebesar Rp70.988.000,- atau 0,51%.
- Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian disediakan dana sebesar Rp655.664.220,- atau 4,67%.
- Sektor Aparatur Pemerintah dengan dana sebesar Rp2.619.987.698,- atau sekitar 18,67%.
- Sektor Pengembangan Dunia Usaha dengan jumlah dana sebesar Rp255.000.000,- atau 1,82%.
- Sektor Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dengan dana sebesar Rp46.684.500,- atau 0,33% dari jumlah anggaran pembangunan tahun 1985/1986.

Adapun gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1985/1986 sampai dengan tanggal 20 Maret 1986 adalah penerimaan Rutin dan Pembangunan yang direncanakan sebesar Rp27.853.437.107 telah dapat direalisir sebesar Rp25.936.411.284 atau 93,12% serta pengeluaran Rutin dan Pembangunan telah direalisir sebesar Rp21.288.159.323 atau 76,43%.

Selanjutnya, Pembangunan bidang Ekonomi di Nusa Tenggara Barat dapat diperinci menurut sektor-sektornya sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian dan Pengairan

Pembangunan pertanian bertujuan meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan para petani. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Usaha tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembangunan lainnya, sehingga hasil yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian cukup menggembirakan. Pembangunan pada sub sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

a. Produksi Pangan

Pembangunan pertanian telah menunjukkan peningkatan yang cukup nyata. Untuk memberi sekedar gambaran adalah peningkatan produksi padi pada awal Repelita III; tahun 1979 produksi padi sebesar 671.165 ton gabah kering giling dan pada tahun 1980 produksi padi meningkat menjadi sebesar 879.134 ton gabah kering giling. Pada tahun 1981 produksi padi meningkat menjadi sebesar 889.363 ton gabah kering giling. Sedangkan tahun 1982 meningkat lagi sehingga menjadi 1.026.011 ton gabah kering giling. Lihat Tabel III-1.

- *people's housing and settlement with an allocation of Rp222,240,375 or 1,58 %*
- *legal affairs to which an allocation is made amounting Rp18,874,000 or 0,13 % of the 1985/1986 budget*
- *public order with an allocation of Rp260,735,685 or 1,86 %*
- *information, social communication and mass media Rp655,664,220 of 4,67%*
- *science, technology and research Rp655,664,220 of 4,67 %*
- *government apparatus Rp2,619;987,698 of 18,67 %*
- *enterpreneurship development Rp255,000,000 of 1,82 %*
- *natural resources and living environment Rp46,684,500 or 0,33 %*

Out of Rp27,853,437,107 targetted for the Regional Revenue and Expenditure Budget 1985/1986 an amount of Rp25,936,411,284 or 93,12 % had been realized as up to 20 March 1986 revenue while Rp21,288,159,323 or 76,43% was realized as expenditure.

The economic development of West Nusa Tenggara will be desoribed here throught sector per sector :

1. Agriculture and Irrigation Sector

Agriculture development intends to raise agricultural production and farmers' welfare. In order to achieve the goal the following operations have been undertaken, namely intensification, extensification, diversification and rehabilitation. Those operations are carried out in a coordinated way resulting in a satisfactory agricultural development. The agricultural development sector comprise food crops, plantation, animal husbandry, fishery and forestry.

a. Food stuff production

Agricultural development has shown abvious increase. Paddy production was increased in Pelita III; in 1979 the paddy production was 671.165 ton of mill dry paddy while 879.134 ton of mill dry paddy was produced in 1980. Another increase took place in 1981 indicating 889.363 ton of mill dry paddy which was followed by an increased production of 1.026.011 ton of mill dry paddy. See Table III – 1

Paddy production increase is very encouraging and the reason it is the technological development, larger area harvested and the promotion of the Integrated efforts of farmers/righ application practiced within the BIMAS/-INMAS with the filed extension and also the gogorancah system executed by the Prosperity Operation Team.
See Tables III – 2 and III – 3

Tabel / *Table III - 1*
LUAS PANEN RATA-RATA PRODUKSI DAN PRODUKSI PADI SAWAH DAN PADI LADANG DI DAERAH NTB TAHUN 1969 - 1984
HARVESTED AREA AND YIELD AND PRODUCTION WET FIELD AND DRY FIELD PADDY IN NTB

Tahun / *Year*	Luas Panen (Ha) / *Harvested area (ha)*	Rata-rata Produksi (Kw/Ha) / *Production yield quint/ha*		Produksi (Ton) / *Production (ton)*		
		Gagang kering giling / *Dry stalk paddy*	Gabah kering giling / *Dry paddy*	Gagang kering giling / *Dry stalk paddy*	Gabah kering giling / *Drey Paddy*	Beras / *rice*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1968	197.907	24,36	18,64	482.107	368.811	250.697
1969	185.533	23,47	17,96	435.487	333.148	226.453
1970	190.839	26,40	20,40	509.007	389.390	264.684
1971	204.290	21,79	16,67	445.049	340.462	231.425
1972	182.214	25,54	19,54	[illegible]	356.009	241.993
1973	202.471	31,92	24,42	646.328	494.441	336.091
1974	204.189	34,79	26,91	710.448	549.415	373.458
1975	207.189	35,10	26,85	727.279	556.368	378.186
1976	205.671	36,61	28,00	752.985	575.818	391.552
1977	187.737	34,95	26,73	656.114	501.742	341.180
1978	224.194	37,17	28,42	833.263	637.211	433.297
1979	201.206	37,34	28,56	751.337	574.552	390.695
1980	220.412	39,91	30,46	879.602	671.452	456.587
1981	239.945	45,22	34,58	1.085.073	829.762	564.238
1982	245.101	47,26	36,08	1.158.398	884.273	601.306
1983	231.765	49,30	37,63	1.142.642	872.246	593.127
1984 *)	250.637	49,79	38,01	1.247.899	952.595	647.764

Sumber BPS Catatan *) Angka Sementara.
Source : Central Bureau of Statistics
Note : *) preliminary figures

Pertumbuhan produksi padi yang makin menggembirakan ini adalah sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan makin luasnya areal panen serta dikembangkannya Usaha Tani Terpadu Tepat Guna dalam rangkaian Bimas/Inmas lengkap dengan penyuluh lapangan; dan kegiatan penanaman padi dengan sistem Gogorancah yang ditangani oleh Team Operasi Tekad Makmur. Lihat Tabel III-2 dan III-3.

The success in supported by favourable factors as follows :

1. *good climate and use of IR paddy seeds of shorter maturity resulting in more frequency of cultivation*
2. *less insects and pest disease*
3. *greater availability of production means such as fertilizer*
4. *development of water sources and irrigation structures*

Tabel / *Table III - 2*

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BIMAS DAN INMAS PADI DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIPERINCI MENURUT KABUPATEN TAHUN 1977 - 1984

PROGRESS OF BIMAS AND INMAS PADDY PERFORMANCE IN NUSA TENGGARA BARAT BY DISTRICT IN 1977 - 1984

(ha)

No	Kabupaten *District*	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1	Lombok Barat								
	- Bimas	19.462.	18.813.	11.313.	8.907.	8.521.	498.	2.061.	127.
	- Inmas	3.077.	11.671.	19.871.	24.763.	27.828.	2.065.	14.078.	1.219.
2	Lombok Tengah								
	- Bimas	8.168.	5.057.	19.426.	16.977.	15.453.	2.627.	-	2.742.
	- Inmas	8.239.	10.728.	31.307.	28.847.	39.875.	3.165.	13.922.	53.660.
3	Lombok Timur								
	- Bimas	9.258.	13.304.	17.258.	22.060.	25.901.	1.018.	-	89.
	- Inmas	19.689.	20.225.	23.571.	30.580.	28.031.	37.471.	12.749.	49.031.
4	Sumbawa								
	- Bimas	1.506.	815.	2.094.	5.542.	4.254.	5.412.	22.	2.138.
	- Inmas	747.	979.	3.207.	3.786.	11.641.	13.328.	3.025.350.	20.660.
5	Dompu								
	- Bimas	216.	310.	1.061.	1.126.	1.547.	1.538.	-	142.
	- Inmas	254.	298.	2.584.	2.328.	4.339.	5.318.	1.457.	8.122.
6	Bima								
	- Bimas	1.132.	707.	2.020.	7.150.	13.662.	8.958.	-	2.419.
	- Inmas	1.332.	1.560.	6.031.	10.353.	16.950.	19.912.	7.549.	27.728.
	Nusa Tenggara Barat								
	- Bimas	39.692.	39.070.	53.172	61.262.	69.338.	62.251.	2.083.	7.957.
	- Inmas	38.338.	45.456.	86.621	100.657.	128.664.	136.259.	3.075.098.	205.428.

Tabel / *Table III - 3*

PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN

PROGRESS OF AGRICULTURAL EXTENSION OFFICERS AVAILABILITY

URAIAN	BPP *Extension Centre*	WKPP *Working Area*	Kelompok Tani *Farmers Groups*	PPS *Agr. Ext Specialist*	PP *Senior*	PPL *Agr. Ext Agr. Ext.*
Akhir Pelita II *End Pelita*	32	306	3.882.	11	67	188.
1979/1980	32	306	3.882.	13	67	239.
1980/1981	32	310	3.882.	12	67	235.
1981/1982	35	362	3.974.	12	76	224.
1982/1983	35	362	4.037.	15	83	294.

Disamping itu keberhasilan ini didukung pula oleh adanya faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

a Iklim yang baik dan penggunaan bibit padi IR yang berumur pendek sehingga frequensi tanaman padi menjadi bertambah.

b Serangan hama/penyakit relatif sedikit.

c Adanya kemudahan bagi para petani didalam memperoleh sarana produksi terutama pupuk.

d Pembangunan dan pengembangan sumber-sumber air serta prasarana irigasi.

Khusus untuk daerah rawan pangan Lombok Selatan, usaha-usaha penanggulangan dibidang pengairan adalah meliputi :

1 Rehabilitasi jaringan-jaringan irigasi yang sudah ada, seperti irigasi Jurang Sate.

2 Pembuatan waduk Batujai yang mampu mengairi sawah ± 3.000 Ha.

3 Pembuatan Saluran suplesi irigasi Renggung, dengan maksud untuk mengalihkan kelebihan air yang mengalir dari Lombok Barat ke Daerah Lombok Selatan. Proyek ini sedang dalam pelaksanaan.

4 Pengembangan air tanah.

5 Disamping itu juga diadakan rehabilitasi dan pembuatan embung-embung yang merupakan waduk tradisi masyarakat. Embung-embung ini mempunyai kapasitas/kemampuan yang sangat terbatas, namun cukup membantu dalam mengatasi kegagalan-kegagalan panen.

6 Untuk memanfaatkan air secara efisien maka pembuatan jaringan tersier dilakukan di seluruh Daerah Nusa Tenggara Barat ter-

The efforts in the field irrigation, particularly in Lombok Selatan which is food shortage prone area, comprise

1. *rehabilitation of existing irrigation structure such Jurang Sate*
2. *construction of Batujati dam which is capable of irrigation 3.000 ha*
3. *construction of overflow canal from Renggung irrigation with the purpose of diverting the excess water from Lombok Barat to Lombok Selatan. This Project is still going on.*
4. *development of ground water*
5. *rehabilitation of water reservoirs and construction of new ones. This traditional water reservoir has limited capacity but very useful in overcoming the harvest failures.*
6. *construction of tertiary canals in all Nusa Tenggara Barat area including Lombok Selatan which is a critical area in order to achieve efficient use of water. Additionally, pilot projects and demonstration plots are established in Jurang Sate Irrigation area. The purpose of the demonstration plot and pilot peojects is to convince farmers on the use of less water without detrimenting the paddy production yield per ha.*

The significant effect obtained by the farmers particularly in food shortage prone area by conducting gogorancah is shown in the fact that their socio economic condition has become better since they have been able to supply their food until the end of the food shortage period. They are relieved from the anxiety of food shortage and debt.

b. Animal Husbandry

Intensification, extensification and diversification have been implemented in order to increase the livestock production. Intensification is carried out through slaughter poultry five efforts, artificial insemination, bimas poultry, cattle development through Rural Credit Project (RCP). Slauhter poultry five efforts (PUTP) is carried out by providing credit to the breeders in form of cattle breeds, feed stuff and medicines. Diversification is carried out promotion of various cattle/poultry breeding such as highly bred chickens.

Extensification is connected with the promotion in new settlement area or region with less population. This practice has increased the livestock population which at the same time is resulted from the availability of extension such as extension officers, vaccinators and inseminators. The coordinated efforts has really raised the livestock population.

In 1968 (pre-Pelita) total population of cattle was 1.20.135 animals, which was increased to 2.869.478 animals at the end of Pelita II.

masuk di daerah kritis Lombok Selatan. Kemudian diikuti juga dengan proyek-proyek percontohan dan Demplot yang mengambil lokasi di daerah irigasi Jurang Sate. Dengan demplot dan proyek percontohan dimaksud untuk meyakinkan para petani bahwa penghematan pemakaian air tidak mengurangi hasil produksi padi per Ha.

Hasil nyata yang dirasakan oleh para petani di daerah rawan pangan dengan adanya keberhasilan program intensifikasi gogorancah ialah bahwa keadaan sosial ekonomi mereka menjadi bertambah baik, oleh karena kebutuhan pangan sampai dengan saat paceklik sudah dapat dicukupi sehingga mereka dapat terhindar dari kerawanan pangan dan hutang yang selama ini senantiasa menghantui kehidupan mereka sehari-hari.

b. Peternakan

Usaha meningkatkan produksi ternak pada umumnya dilakukan melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan jalan Panca Usaha Ternak Potong, Inseminasi buatan, bimas ayam, pengembangan usaha sapi melalui Rural Credit Project (RCP). Usaha Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) tersebut dilaksanakan dengan jalan menyediakan paket kredit bagi para peternak berupa bibit ternak, makanan ternak dan obat-obatan. Usaha diversifikasi diwujudkan dalam bentuk dorongan untuk mengusahakan ternak yang lain seperti ayam ras dan sebagainya.

Sedangkan usaha ekstensifikasi dilaksanakan berkaitan dengan pengembangan daerah-daerah pemukiman baru atau daerah-daerah yang kepadatan penduduknya kurang. Usaha ini sangat besar perannya dalam rangka peningkatan populasi ternak produksi hasil ternak. Untuk usaha menunjang populasi ternak juga ditingkatkan pula penyediaan sarana penyuluhan, seperti tenaga penyuluhan, vaksinator dan inseminator. Keterpaduan di dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut memberikan hasil yang sangat menggembirakan dalam rangka peningkatan populasi ternak.

Pada tahun 1968 (sebelum Pelita) keseluruhan populasi ternak sebanyak 1.820.133 ekor. Jumlah tersebut meningkat, menjadi 2.869.478 ekor pada akhir Pelita II.

Jumlah populasi ternak sampai dengan tahun ke empat Pelita III (Thn 1983) meningkat menjadi 4.119.689 ekor. Sedangkan penyebaran berbagai jenis bibit ternak pada tahun terakhir Pelita II (1978) sebanyak 11.604 ekor. Jumlah ini pada tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 28.567 ekor. Lihat Tabel III-4.

Khusus untuk sapi Bantuan Presiden (Banpres) yang telah disebarkan ke seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II se-Nusa Tenggara Barat, perkembangan cukup menggembirakan.

Jumlah sapi Banpres dari tahun 1974/1975 sampai dengan tahun 1982/1983 adalah sejumlah 5.096 ekor dengan jumlah pengadas 2.990 orang.

Perkembangan Sapi Banpres tersebut adalah sebagai berikut :
- Jumlah pendropan sejak tahun 1974/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 sejumlah .... 5.096 ekor
- Perkembangan sampai dengan tahun 1982/1983 (pokok + turunan) .... 9.616 ekor
- Jumlah yang telah dibebaskan .... 2.183 ekor terdiri dari pokok 1.368 ekor, dan turunan 815 ekor.
- Jumlah milik Pemerintah sampai dengan tahun 1982/1983 7.443 ekor. terdiri dari pokok 5.827 ekor dan turunan 1.576 ekor, dengan jumlah pengadas 3.533 orang. (Lihat Tabel III-5).

c. Perikanan

Pembangunan perikanan ditekankan pada pembangunan perikanan rakyat, dengan tujuan :

1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan dan petani ikan yang diarahkan kepada peningkatan eksport non minyak dan gas.
3. Memasyarakatkan kebiasaan makan ikan bagi rakyat.
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan perikanan sebagai upaya untuk mengurangi sekecil mungkin terjadi kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan sub sektor perikanan pada khususnya dan kepentingan Negara dan Bangsa pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah banyak dilakukan kegiatan-kegiatan seperti; usaha motorisasi perahu-perahu penangkap ikan, sehingga mempunyai jarak jangkauan operasi yang lebih luas, usaha modernisasi alat penangkap ikan, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya ikan air tawar ataupun air payau (tambak), usaha diversifikasi alat penangkap dan jenis-jenis ikan yang dibudidayakan.

Usaha-usaha motorisasi perahu penangkap ikan sangat pesat. Pada tahun pertama Pelita I (1969) nelayan di Nusa Tenggara Barat belum

The cattle population was 4.119.689 animals at the fourth year of Pelita III (1983) whereas the distribution of breeds reached 11.604 animals at the end of Pelita II (1978) and this was again increased to become 20.567 animals during 1982/1983. See Table III–4.

Tabel / *Table III - 4*
PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DI NUSA TENGGARA BARAT
CATTLE POPULATION IN NUSA TENGGARA BARAT

No	Jenis Ternak / Animals	Sebelum Pelita / Pre Pelita	Tahun terakhir Pelita I / Last Year Pelita I	Tahun terakhir Pelita II / Last Year Pelita II	Pelita III (th 1982) / Pelita III 1982
1	Sapi/*Cows*	165.806	181.576	185.926	228.813
2	Kerbau/*Buffalo*	200.175	184.947	189.475	191.939
3	Kuda/*Horse*	103.788	78.144	74.428	64.095
4	Kambing/Domba/ *Sheep/Goat*	137.223	112.139	142.563	201.717
5	Babi/*Pigs*	7.191	10.655	14.507	19.843
6	Ayam/*Chikens*	511.422	1.327.997	1.927.512	2.719.336
7	Itik/*Ducks*	87.607	184.693	341.438	693.946
	Jumlah/*Total*	820.233	2.076.151	2.869.478	4.119.689

Especially the cows coming from the Presidential Aid (Banpres) that had been distributed to all districts in West Nusa Tenggara had shown fairly promising growth.

*The cows of **Banpres** from 1974/1975 until 1982/1983 amounted to 5,096 heads, while the number breeders amounted to 2,990 people.*

The growth of Banpres cows could be illustrated as follows :
- *The number sent since 1974/1975 till 1982/1983 was 5,096 heads.*
- *The growth to the extent of 1982/1983 (the originals + generation) resulted 9,616 heads.*
- *The number of cows remitted was 2,183 heads comprising of 1,368 heads, the originals, and 815 heads, the generation.*
- *The cows belonging to the Government until 1982/1983 were 7,443 heads comprising of 5,827 heads, the originals, and 1,576 heads, the generation; while **pengadas** were 3,533 people.*

Tabel / *Table III - 5*
JUMLAH TENAGA PENYULUHAN INSEMINATOR
DAN VAKSINATOR 1978 - 1983
FIELD INSTRUCTORS OF INSEMINATION AND VACCINATION
(orang/*people*)

No	Jenis tenaga Penyuluh / *Types of Field Instructors*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	Penyuluh peternakan Spesialis / *Special animal husbandry field instructor*	7	7	7	7	9	11
2	PPL dan demonstrator / *Field instructor and demonstrator*	9	20	27	30	31	31
3	Kader Peternak / *Animal husbandry farmer cadre*	515	544	762	767	850	888
4	Insminator / *Insemination officer*	9	9	9	9	12	12
5	Laboratorium diagnostik / *Dianostic laboratory*	-	-	9	13	16	20
6	Vaksinator / *Vaccination officer*	51	65	71	89	112	112
	Jumlah/*Total* :	391	645	885	915	1.030	1.074

c. Fishery

The development of fishery is concentrated on the people's fishery, with the following objective :

1. *to increase the income of fishermen and fish farmers*
2. *to increase the production and productivity of fishermen and fish farmers with the intention of non-oil and gas export*
3. *to promote fish consumption amongs people*
4. *to increase control and supervision of fisheries operations in order to minimize the activities detrimental to the fishery subsector itself, state and nations as well.*

ada yang mempergunakan perahu motor. Pada tahun terakhir Pelita II (1978), jumlah tersebut meningkat menjadi 97 buah motor tempel dan pada akhir tahun 1982 telah berkembang menjadi 2.963.

Usaha modernisasi alat penangkapan, melalui pengenalan terhadap alat-alat perikanan yang lebih produktif dan selektif. Usaha ini hasilnya sangat menggembirakan, yaitu terhadap alat mini Purse Seine yang sementara ini dianggap paling cocok untuk perairan Nusa Tenggara Barat. Pada akhir Pelita II (1978) hanya terdapat 8 unit Purse Seine yang kemudian pada tahun 1982 berkembang menjadi 146 unit.
Tabel III-6

Dibidang budidaya ikan usaha yang paling menonjol adalah inten sifikasi lahan budidaya ikan di kolam air deras, dimana pada akhir Pelita II usaha ini belum ada. Pada tahun 1982 usaha budidaya di kolam air deras ini telah mencapai 200 unit dengan produksi rata-rata 6 ton per unit per tahun. Dari berbagai usaha tersebut di atas produksi perikanan secara keseluruhan meningkat, konsumsi penduduk terhadap produk perikanan juga meningkat, demikian juga pendapatan nelayan dan petani ikan dari usaha perikanan.

Selain hasil yang telah dicapai tersebut di atas, terdapat juga adanya komoditi nener (benih bandeng) dimana peranannya penting bagi Daerah Nusa Tenggara Barat, oleh karena Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi yang besar yang belum seluruhnya dimanfaatkan.
Pada akhir Pelita II (1978) pemanfaatan nener baru sebesar 20.000.000 ekor dan menyerap tenaga kerja hanya sekitar 3.547 orang. Tetapi dalam tahun 1982 pemanfaatan nener mencapai 73.227.703 ekor dengan tenaga kerja yang terlihat sebanyak 12.988 orang dari tingkat pengecer pengumpul dan pedagang besar.

Prospek pemasaran nener di produksi Nusa Tenggara Barat cukup baik mengingat kebutuhan akan nener untuk tambak di Jawa terus meningkat akibat adanya intensifikasi tambak-tambak di Jawa dan mengingat pula potensi nener sebanyak 150.000.000 masih baru dimanfaatkan sebesar 48,8%.
Berapa pusat produksi nener di Nusa Tenggara Barat antara lain Jambianom (Lombok Barat), Beremong, Labuhan Puntik (Sumbawa), Sape (Bima), Mbawi (Dompu). Lihat Tabel III-7.

d. Perkebunan

Pembangunan perkebunan ditekankan kepada Perkebunan Rakyat yang kegiatannya meliputi usaha intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, baik melalui sistem unit-unit pelaksanaan Proyek (UPP) maupun melalui sistem Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Melalui UPP telah dilaksanakan Pengembangan perkebunan kopi yang sampai tahun 1982/1983 terdapat sebanyak 3 UPP yang luasnya 793 Ha, sedangkan melalui PIR terdapat 1 unit yakni yang berlokasi di Soriutu, Kabupaten Dompu, yang berintikan Perkebunan Mente dan Jarak.
Petani yang diikutsertakan dalam Sistem PIR ini diutamakan para petani ladang buruh tani dan buruh perkebunan yang semula direncanakan diperuntukkan bagi 5.000 KK. Rencana tersebut oleh karena adanya hambatan kemampuan tanah yang terbatas, maka targetnya dikurangi, sehingga diperkirakan hanya mampu menampung ± 2.100 KK.

Disamping itu dikembangkan pula usaha-usaha peremajaan tanaman, pemberantasan hama, penyuluhan dan pembinaan petani, perkebunan, perluasan sarana perkebunan seperti kelapa, kopi, tembakau rakyat dan tembakau virginia.

Khusus mengenai perkembangan kapas di daerah Nusa Tenggara Barat, untuk mempercepat pengembangannya Pemerintah telah menempuh kebijaksanaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Petani yaitu dengan mengadakan program-program Intensifikasi Kapas Rakyat.

Dalam rangka menunjang pengembangan perkapasan, Pemerintah membangun pabrik Pengupas Kapas berbiji selain di Pulau Lombok, juga di Pulau Sumbawa dan diteruskan dengan industri hilir yaitu, Pabrik Pemintal Benang serta industri pengolahan minyak biji kapas. Usaha peremajaan tanaman sampai dengan tahun 1982/1983 telah mencapai 1.757,42 Ha yang tersebar pada 6 (enam) Kabupaten.
Tabel III-8.

e. Kehutanan

Luas hutan di daerah Nusa Tenggara Barat tercatat 1.063.473 Ha dengan perincian :

- Hutan Lindung	481.681,8 Ha (45,29%)
- Hutan Produksi terbatas	222.711,5 Ha (20,94%)
- Hutan Produksi biasa	224.320,7 Ha (21,09%)
- Hutan Cagar alam	25.098,5 Ha (2,36%)
- Hutan Suaka Niaga	76.031,0 Ha (7,15%)
- Hutan Wisata	3.629,7 Ha (0,34%)
- Hutan Tanaman Baru	30.000,0 Ha (2,82%)

The following activities have been undertaken such as : motorization of fishing vessels which can reach fac, modernization of fishing equipment, intensification and extensification of inland and brackish water fish cultivation, diversificaiton of fishing equipment as well as fish species.

The motorization of fishing vessel has gone far. No fisherman used motorized vessel during Pelita I (1969) in Nusa Tenggara Barat. The were 97 motorized vessel during Pelita II (1978) and this number was increased to 2.963 at the end of 1982.

The modernization of fishing equipment implemented by introducing more productive and selective equipment. The result was encouraging such as mini purse seine which is considered the most suitable one in Nusa Tenggara Barat. There were 8 units during Pelita II (1978) which was increased to 146 units in 1982. See Table III – 6

Tabel / *Table III - 6*
PRODUKSI PERIKANAN DI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979 - 1984
FISH PRODUCTION IN PROVINCE NUSA TENGGARA BARAT 1979 - 1984

No	Tahun/*Year*	Perikanan/*Fisheries*		Jumlah/*Total*
		Laut/*Sea* (ton)	Darat/*Inland* (ton)	
1	1979	27.524,6	2.439,5	29.964,1
2	1980	28.763,2	2.549,4	31.312,6
3	1981	31.826,2	4.469,4	36.295,6
4	1982	34.432,1	4.985,4	39.417,5
5	1983	39.921,5	4.454,0	44.375,5
6	1984	43.283,0	4.748,3	48.031,3

In the fish cultivation efforts the mosth prominent operations were intensification of the fish cultivation in the flowing water ponds which did not exist during Pelita II. There were 200 units in 1982 with the average production of 6 ton per year. The increased production of fish raise also the fish consumption and also the income of the fishermen and fish farmers.

Beside the above-mentioned success the people started also to produce canos-canos fingerlings which contributed a lot to Nusa Tenggara Barat. This province has great potential which is not fully exploited yet so far.

At the end of Pelita II (1978) only 20,000,000 fingerlings were produced employing 3,547 workers. The production in 1982 was increased to 73,227,703 fingerlings employing 12,988 workers who comprise small retailers, collectors and groceries.

The marketing prospect of these fingerlings in Nusa Tenggara Barat seems to quite good because the demand from Java is increasing due to the intensification of ponds in Java. More over, the potential estimated about 150.000.000 is only exploited by 48,8%. The production centre in Nusa Tenggara Barat are among others Jambianom (Lombok Barat), Beremong, Labuhan Puntik (Sumbawa), Sape (Bima), Mbawi (Dompu). See Table III–7

Tabel / ***Table III - 7***
PERKEMBANGAN PRODUKSI NENER TAHUN 1974 - 1982 (ekor)
CANOS-CANOS FINGERLINGS PRODUCTION 1974 - 1982 (pieces)

Nomor *Number*	Tahun *Year*	Jumlah Produksi *Total Production*
1	1974	1.241.000.
2	1975	1.227.000.
3	1976	1.386.000.
4	1977	8.000.000.
5	1978	20.000.000.
6	1979	29.000.000.
7	1980	53.840.000.
8	1981	67.547.000.
9	1982	73.227.703.

d. Plantations

The development of plantation is concentrated on the small holders through the following activities such as intensification, extensification, rehabilitation by the application of project system or nucles estates.

The coffee plantation development is carried out by implementation of 3 projects covering an area of 793 ha and one nucleus estabte in Soriutu, district Dompu where the nucleus plants are cashes nut and castor ("Jarak"). The nucleus estate project employs mostly farm and estate labourers targetted at 5.000 families. Due to soil capability, the target of the workers was decreased to about 2.100 families only.

Secara Administratif kawasan hutan seluas 1.063.473 Ha tersebut dibagi dalam Wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Lombok (WKPH) seluas 160.898,5 Ha (15,13%) WKPH Sumbawa seluas 505.658,7 Ha (47,55%) dan WKPH Bima/Dompu seluas 396.936,0 Ha (37,32%). Disamping itu Hutan Suaka Alam yang dikelola Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam Propinsi NTB meliputi Suaka Margasatwa Gunung Rinjani (40.000 Ha), Taman Wisata Suranadi (52 Ha).

Suaka Margasatwa Pulau Moyo (18.765 Ha), Cagar Alam Sawo Kecil Pedauh (543 Ha), dan Taman Buru Selatan (30.000 Ha).

Produksi dan hasil hutan pada umumnya terdiri dari kayu jati, rimba, duabanga molucana, albizia falcata dan hasil hutan ikutan. Pada tahun 1978 produksi kayu jati, kayu rimba duabanga molucana sebanyak : 83.975,110 m^3, albazzia falcana sebanyak : 1.066,711 m^3 dan produksi hasil hutan ikutan seperti rotan, kemiri, rumtup sebanyak: 14.818,25 ton.

Khusus kayu Dua Banga Molucana diekspor ke Perancis, Jepang, Italia, Taiwan pada tahun 1978 sebanyak 77.309.090 m^3 sedangkan kayu jati, rimba dipasarkan pada pasaran antar pulau seperti Bali, Jawa yang pada tahun 1978 sebanyak 606.912 m^3.

Kegiatan pemasaran hasil hutan ini sampai dengan tahun 1982/1983 untuk beberapa jenis hasil hutan menunjukkan penurunan, oleh karena bahan bakunya makin kurang, bahkan akhirnya kegiatan produksi hasil hutan sementara hanya dilaksanakan untuk kepentingan dalam daerah dengan maksud untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan tetap dapat dipertahankan. Akan tetapi khusus untuk kayu duabanga molucana kegiatan produksi dan pemasarannya tetap dapat dipertahankan perkembangannya sehingga sampai tahun 1982/1983 tercatat sebanyak 135.185,33 m^3 diekspor ke luar negeri maupun antar pulau. Lihat Tabel III-9.

f. Pangan dan Perbaikan Gizi

Pada dasarnya kebijaksanaan di bidang pangan dan perbaikan Gizi diarahkan untuk mencapai tujuan :

1 Meningkatkan penyediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli rakyat serta mencukupi kebutuhan gizi.
2 Mengurangi penyakit-penyakit yang timbul akibat kurangnya gizi.

The following efforts are also undertaken such as rejuvenation of plants, insects eradication, extension and guidance, and also expansion of plantations, namely coconut, coffee, tobacco, either local as well as virginia.

In order to accelerate the development of cotton plantation in West Nusa Tenggara the government has initiated a Cotton Smallholders Intensification programme with the purpose of increasing people's income.

In the development efforts of cotton, the government has established cotton processing factory in Lombok island, Sumbawa island which will be followed by construction of thread milling factory and cotton seeds processing factory. The rejuvenation has accomplished 1.757,42 ha in 1982/1983 covering 6 districts. See Table III–8.

e. Forestry

The forestry of Nusa Tenggara Barat covers an area of 1.663.473 ha with the following composition :

– protection forest	*481.681,8 ha (45,29%*
– production forest specific	*222.711,5 ha (20,94%)*
– production forest all species	*224.320,7 ha (21,09%)*
– natural reservation forest	*25.098,5 ha (2,36%)*
– commercial wood spread	*76.031,7 ha (7,15%)*
– resort forest	*3.629,7 ha (0,34%)*
– new plants forest	*30.000,00 ha (2,82%)*

The forest, an area of 1,063,473 ha, is administratively divided into Lombok forestry unit (WKPH) covering an area of 160,898.5 Ha (15,13%), Sumbawa forestry unit 505.658,7 ha (47,55%) and Bima/Dompu forestry unit 396,936,0 ha (37,32%). The natural Reservation forest administered by the Nature Protection and Conservation Section of NTB covers Gunung Rinjani (40,000 ha) and Taman Wisata Suranadi (52 ha), Suaka Margasatwa Pulau Moyo (18,765 ha), Cagar Alam Sawo Kecil Pedauh (543 ha) and Taman Baru Selatan (30,000 ha).

Forest production consists of teak, forest woods, duabunga molucana, albizia falcata and other forest products. In 1978 the pdoruction of teak, forest woods and duabunga molucana amounted 83,975.110 m3, albazia falcata amounting 1,066.711 m3 and other forest products such as rattan, nutmeg, grass amounted 14,828.25 ton.

Tabel / *Table III - 8*
PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
PROGRESS OF SMALL HOLDERS PLANTATIONS PRODUCTION

No	Jenis Tanaman *Plants*	1968 sebelum Pelita I *1968 pre Pelita I*		1974 akhir Pelita I *1974 end Pelita I*		1979 akhir Pelita II *1979 end Pelita II*		1983 akhir Pelita III *1983 end Pelita III*	
		Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)	Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)	Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)	Luas *Area* (ha)	Produksi *Production* (ton)
1	Kelapa/*Coconut*	25.757,50	23.175	48.686,82	24.480,69	54.352,29	24.458,6	55.272,23	23.404,31
2	Kopi/*Coffee*	2.127.	279,50	3.085,12	624,27	3.583,31	602,4	4.416	580,374
3	Cengkeh/*Clove*	-	-	185,24	0,02	1.164,73	3,4	1.185,29	18,665
4	Coklat/*Cocoa*	-	. -	3,88	0,95	1,80	0,3	1,80	0,206
5	Kapok/Randu/*Kapok*	1.588.	320.	4.058,89	686,88	4.648,45	405,8	4.554,99	463,31
6	Tebu/*Sugarcane*	2.054	35.400.	1.368,63	3.680,35	599,80	494,9	566,20	526,09
7	Tembakau Virginia/*Tobacco Virginia*	-	-	598,7	532,280	847,96	1.036,8	1.255,89	1.658,55
8	Tembakau Rakyat/*Tobacco Small holders*	7.757.	•2.273,80	4.366,14	1.473,65	6.496,54	2.619,98	4.169.	1.769,625
9	Jarak/*Jarak*	1.029.	575.	3.555,5	450,5	546,00	100,0	1.213,50	131,82
10	Kapas/*Cotton*	3.119.	634.	1.489,72	876,97	368,15	231,0	3.791,64	1.657,66
11	Lada/*Pepper*	3,60	0,70	11,30	8,11	11,65	13,0	11,65	4,78
	Jumlah/*Total*	43.435,10	62.658.	67.409,94	32.814,67	72.621,68	29.966,18	76.438,19	30.215,40

Usaha pengadaan pangan setiap tahunnya makin dimantapkan dengan maksud agar supaya bahan pangan cukup tersedia bagi rakyat. Dengan cukup tersedianya bahan pangan maka harga pangan selalu berkembang secara layak dalam arti tidak akan meningkat dan menurun secara bergejolak sehingga dapat meresahkan rakyat banyak. Untuk itu telah ditetapkan harga beras tertinggi bagi beras tahun 1978/1979 Rp119,50, tahun 1982/1983 Rp238,00 dan tahun 1983/1984 Rp371.

Harga bahan pangan tertinggi beras setiap tahun ditinjau dan disesuaikan dengan harga dasar gabah yang berlaku. Oleh karena itu harga bahan pangan tertinggi bagi beras setiap tahun meningkat ratarata 14,35%. Untuk menjamin harga beras tidak meningkat melampaui harga batas tertinggi dijalankan penyaluran beras pada pasar umum melalui Operasi Pasar terutama diarahkan tempat yang harga pasarnya cenderung mendekati harga batas tertinggi atau tempat-tempat yang mengalami musim paceklik.

The duabunga molucana woods are exported to France, Japan, Italy, and Taiwan in 1978 totalling 77,309,090 m3 while teak and forest woods are shipped interisland to Bali and Java totalling 606,912 m3 in 1978.

Some forest commodities have decline as up to 1982/1983 because condition of forest has deteriorated and, du to the fact that at present the forest products are used in the region itseft with the purpose of conserving the nature and its environment. However, duabunga molucana woods are marketed and the export as up to 1982/1983 has amounted 135.185,33 m3 either abroad or other islands. See Table III–9.

Food and Nutritional Improvement

Basically, the policy in the field of food and nutritional improvement is directed toward the following objectives:

1. To increase food supply while meeting nutritional needs at a generaly affor-

Penyaluran beras oleh Dolog pada tahun 1978 adalah sejumlah 32.867 ton dan pada tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 118.227 ton, sedangkan pada tahun 1983/1984 (s/d bulan Juni 1983) sejumlah 17.268 ton. Untuk menjamin petani produsen padi dapat menerima harga yang wajar untuk gabah yang dijual, maka harga gabah ditingkatkan secara berkala. Pada tahun 1978 harga padi kering lumbung di desa adalah Rp 54/kg, gabah kering giling di desa Rp 74/kg dan gabah kering giling di KUD Rp 75/kg. Pada tahun 1981/1982 meningkat menjadi Rp 120, untuk Gabah kering giling KUD.

Tabel / *Table III - 9*
PRODUKSI HASIL HUTAN TAHUN 1974 - 1983 (m3)
FOREST PRODUCTS 1974 - 1983 (m3)

No	Tahun *Year*	Produksi/*Production* Jati *Teak*	Rimba *Others*	Duabanga Molucana *Duabanga Molucana*	Jumlah *Total*
1	1974	1.282,820	4.298,635	32.619,13	38.200,585
2	1975	942,303	3.866,425	32.580,920	37.389,650
3	1976	1.814,224	4.972,786	77.275,210	84.061,710
4	1977	1.721,385	5.364,645	67.481,490	74.567,520
5	1978	1.786,662	6.724,367	77.369,090	85.880,119
6	1979	1.194,411	8.463,301	49.593,10	50.250,812
7	1980	505,468	4.747,972	63.550,73	68.804,170
8	1981	762,823	858,50	16.600,25	18.221,573
9	1982	499,716	1.080,107	5.441,23	7.021,053
10	1983	685,654	2.432,966	8.670.	11.788,620

Untuk menjaga kekurangan pangan masyarakat di musim paceklik telah diusahakan sarana penyangga yang cukup. Pada tahun 1978, besarnya penyangga pangan adalah 41.289 ton, pada tahun 1982/1983 besarnya meningkat menjadi 105.376 ton atau meningkat 155%. Sedangkan pada tahun 1983 adalah 45.859 ton.

Dengan meningkatnya pengadaan yang besar tersebut kita sudah dapat membantu mensupply kepada Propinsi-propinsi lainnya seperti Irian Jaya, Maluku, NTT, Timor Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Riau dan Sumatera Barat. Tahun 1978 jumlah pengiriman (move out) sejumlah ± 26.644 ton beras dan pada tahun 1982 meningkat menjadi 63.000 ton beras.

Untuk menyimpan sarana penyangga pangan, pada tahun 1978 telah tersedia gudang milik pemerintah sebanyak 3 unit kapasitas 10.500 ton. Sampai dengan tahun 1983/1984 telah dibangun 10 unit Gudang Permanen dengan kapasitas 28.500 ton, 57 unit gudang semi permanen dengan kapasitas 60.000 ton, dan gudang swasta sebanyak 19 unit dengan kapasitas 28.600 ton.

Sementara itu program perbaikan gizi rakyat diarahkan untuk menunjang peningkatan gizi dan menanggulangi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, anemia gizi, beri-beri dan gondok endemik. Sasaran utamanya adalah golongan anak-anak berumur 0-6 tahun, wanita sedang hamil, wanita sedang menyusui, dan penduduk daerah rawan pangan.

Kegiatan pokok dari program ini meliputi penyuluhan penimbangan anak Balita, pemberian makanan tambahan dan pemberian paket pertolongan Gizi. Disamping itu berhasilnya peningkatan produksi pangan sangat berpengaruh terhadap makin membaiknya gizi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Biro Pusat Statistik yang bekerjasama dengan Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1980 kandungan kalori masyarakat telah mencapai 2.160.64 kalori dan 47.738 gram protein serta 30.240 gram lemak. Kandungan kalori dan protein masyarakat tersebut di atas ternyata telah melampaui Standar nasional, masing-masing sebesar 1.910 kalori dan 41,8 gram protein.

f. Pengairan

Pembangunan pengairan dimaksudkan untuk menunjang usaha peningkatan produksi pangan melalui penyediaan air irigasi yang cukup, pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan pengairan dilaksanakan melalui program pembangunan jaringan irigasi baru, perbaikan dan peningkatan irigasi serta eksploitasi dan pemeliharaan irigasi.

Dari luas baku sawah 155.233 dalam tahun 1978 baru dapat dikembangkan areal sawah beririgasi (potensial) seluas 134.959 Ha. Sedangkan dalam tahun 1982/1983, dengan adanya irigasi yang bertambah baik luas baku sawah menjadi 158.532 Ha dan sawah irigasi (potensial) menjadi 141.906,60 Ha (bertambah 5,54%) dari tahun 1978.

dable price.

2. To reduce malnutrition related diseases

The effort to produce more food supply will be accelerated to enable providing sufficient food supply for the people. With sufficient food supply development of foodstuff price could be monitored, no drastic increase of decrease because fluctuation could cause unrest among public. For this purpose, ceiling price of price has been set for Rp119,50 in 1978/78, Rp238,00 in 1982/1983 NS Rp371 in 1983/1984.

Every year the ceiling price of rice increases by 14,35%. To ensure that the price does not fluctuate above ceiling price, the distribution of rice to the markets was carried out through Market Operation which was mainly directed to markets with tendency of approaching ceiling price and to the paceklik areas. In 1978, Dolog distributed 32.867 tons of rice and it was increased to 118.227 tons in 1982/1983. while in 1983/84 (till July 1983) the distribution reached 17.268 tons To ensure that farmers receive good price for unhusked rice, periodical increase of its price has been set up. In 1978, the price of dried unhusked rice in the village was Rp54/kg, of dried milled rice was Rp74/kg and in KUD, the price became Rp75/kg The price of milled unhusked rice reached Rp120/kg at KUD during 1981/82.

To prevent shortage of food stuff during paceklik areas sufficient supportive arrangement had been prepared. In 1978, the supportive supply amounting to 41,289 tons, and in 1982/1983 in came to 105.370 tons or increase by 155%. In 1983 alone, it reached 45,859 tons.

With those substantive increase, West Nusa Tenggara province managed to provide supply to other province such as Irian Jaya, Maluku, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, East Kalimantan, West Kalimantan, DKI Jakarta, Riau and West Sumatra. In 1978, total number of the move-out was 26.644 tons of rice and in 1982, it was increased to 63,000 tons.

To store the supportive food supply, 3 unit of 10.500 tons capacity were constructed by the government in 1978. Up to 1980/1984 10 permanent storage unit with capacity of 28.500 tons and 57 semi-permanent storage pf 60,000 tons were constructed by the government; 19 storage units of 28.600 tons were built by the private sector.

Meanwhile, nutritional improvement programme ws aimed at supporting improvement of nutritional level of groups suffered from shortage of food stuff, nutritional anaemia, "beri-beri" and endemic goitre. The main target groups of this programme was directed towards children age 0-6 year, pregnant women, breast-fed mothers and people of food critical areas.

Main activities of this programme covering extension for measuring weight for children under five, provision of extra food and nutritional package. Other than that, success in food production increase brought about improvement in the nutrition of the people.

According to a study carried out in 1981 by the Central Bureau of Statistics, in cooperation with the Regional Development Planning Board of the West Nusa Tenggara Province and Sensus & Statistics Provincial Office, consumption of calorites reached 2.160.64 cal and 47.738 grams protein and 30.240 grams of fat. In fact this calories consumption surpassed the national standards, i.e. 1.910 calories and 41.8 grams protein.

Irrigation Sector

Irrigation development is directed to support increase of food production by securing provision of irrigation water, opening and utilizing of the new cultivation land. In order to achieve the objectives, the irrigation devleopment was carried out by constructing new irrigation networks and rehabilitating, maintaining and utilizing the existing networks.

In 1978, out of 155.233 ha rice field areas, 134.959 ha were developed in to irrigated wet lands. In 1982/83 with better irrigation, total rice fields were expanded to 158.532 ha and irrigated wet lands (potential) came to 141.906,60 ha (5.54% Increase from 1978).

Irrigation projects were developed to deal with water shortage in Lombok island including contruction of Batujai dam, rehabilitation of Jurangsate Irrigation, High-Level Diversion (HLD) or Suplesi Renggang, development of ground water resources, Pengga and Sulkang Dams.

During early Repelita IV, various irrigation areas were developed including Jurangsate area to cover 10.450 ha, Batujai Kiri to cover 6.000 ha, Pompu – 2,800 ha, Muju – 3.500 ha, Sulkang – 5.100 ha and Swangi + Pandanduri – 6.400 ha. Batujai dam has the capacity of 25 million m3 water, sinking are of 8.9 km2 with planned water debet 1.332 m3/second. Jurangsate debet capacity 764 m3/second coveing irrigation area of 3.500 ha. Jurangsate project with its main premier of 16,50 cm, has 20 water constuction & 30 suppiementary constructions, and secondary channels of 132.50 km.

Presiden Soeharto berkenan meresmikan penggunaan jembatan Batujai di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Seusai peresmian, Presiden dan Ibu Tien Soeharto mengamati jembatan itu dari dekat. Dari kejauhan tampak jembatan Batujai, sementara dua orang masyarakat Batujai menikmati jalannya upacara peresmian, dengan keasyikan tersendiri.

President Soeharto inaugurating the operation of Batujai bridge in West Nusa Tenggara Province. After this ceremony the President and Madame Tien Soeharto observed the said bridge closely. In the distance two people from Batujai also attended seriously the opening ceremony of the bridge.









President bersama Ibu Tien Soeharto saat memanen kerang mutiara. Sebagai komoditi non--migas, kerang mutiara cukup potensial untuk dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hasilnya dapat disaksikan pada foto di halaman ini. Akhir-akhir ini bahkan mutiara termahal yakni "si biru" dan "si hitam" berhasil pula dikembangkan.

President and Madame Tien Soeharto at the time. of witnessing the pearl shell harvest. As a non-oil-and-gas commodity, the pearl-shell is potential enough to be breeded in the waters of West Nusa Tenggara. Even the "blue" and "black" pearl shells have succeeded to breed.



Kerang mutiara yang dikembangbiakkan di NTB mempunyai daya tarik tersendiri terutama bagi kaum wanita tentunya. Presiden bersama Ibu Tien Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana serta para Menteri asyik mengamati dengan seksama.

President and Madame Tien Soeharto, Mrs Siti Hardianti Rukmana and a number of Cabinet Ministers eagerly watching the said jewels. Pearl shell breeding in West Nusa Tenggara has been expanded.











Rentetan peristiwa berhasil direkam, ketika Menteri Pertambangan dan Energi Soebroto meresmikan penggunaan Listrik Masuk Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Lombok Barat, NTB awal tahun 1987.

The Minister of Mining and Energy, Mr Soebroto, inaugurating the operation of electricity in Tanjung Karang village, in the Subdistrict of Ampenan, West Lombok, the Province of West Nusa Tenggara at the beginning of 1987.









Keindahan dan kekayaan alam Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan daya tarik luar biasa bagi para turis. Bahkan kegiatan pasca panen yang masih dikerjakan secara tradisional juga mempunyai daya tarik khusus. Atas obyek turis biawak Komodo dan tengah salah satu dari danau tiga-warna Kelimutu.

The natural beauty and wealth of West Nusa Tenggara Province are of most attractive to tourists. Land cultivation after planting season has been done in the conventional way. Above the Komodo reptile. Centre : the three-colour lake of "Kelimutu"



Tak dapat disangkal lagi, wilayah NTB memang cukup dikenal sebagai penghasil beras. Meskipun demikian pengolahan tanah persawahan masih banyak yang dilakukan secara tradisional, antara lain pemakaian kerbau untuk membajak sawah masih ditemui di sana-sini.

West Nusa Tenggara is noted for its rice-yielding area but the local farmers still use the traditional farming implements in the processing of their land.

Melalui Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dapat pula disampaikan pesan-pesan pembangunan. Di Nusa Tenggara Barat, kegiatan PKK berkembang sesuai dengan program pemerintah. Hampir seluruh program pokok PKK berjalan secara baik.

The activities of the PKK (Family Welfare Promotion) in West Nusa Tenggara have flourished and developed in line with the government programmes. Nearly all programmes of the PKK could be realized consistently. Through this social institute a number of development messages could also be disseminated.

















Jika Menteri Penerangan Harmoko tertarik pada panen bawang putih, wajar Gubernur NTB Gatot Suherman bersemangat memanennya. Bukan hanya sektor pertanian dalam pengertian tanaman pangan saja yang berkembang pesat, peternakan pun mampu menunjukkan andilnya.

Witnessed by the Minister of Information Harmoko, the Governor of West Nusa Tenggara Gatot Suherman enthusiastically took part in harvesting white onion in the people's farm. Food plantation as well as animal husbandry have been expanding in this region.

Proyek-proyek pengairan yang dibangun guna menanggulangi masalah kekurangan air di Pulau Lombok adalah pembangunan Bendungan Batujai, Rehabilitasi Irigasi Jurangsate, High-Level Diversion (HLD) atau Suplesi Renggung, Pengembangan Air Tanah, Bendungan Pengga dan Bendungan Sulkang.

Daerah irigasi yang dibangun dalam awal Repelita IV masing-masing adalah daerah Irigasi Jurangsate dengan target areal seluas 10.450 hektar, Batujai 3.500 Ha dan daerah Irigasi HLD seluas 10.800 hektar. Pada tahun-tahun sesudahnya dibangun irigasi Pengga seluas 4.150 Ha, Ekstension Jurangsate 4.000 Ha, Batujai Kiri 1.000 Ha, Pompa 2.800 Ha, Mujur 3.500 Ha, Sulkang 5.100 Ha dan daerah irigasi Swangi serta Pandanduri seluas 6.400 Ha.

Proyek Irigasi Batujai berkapasitas 25 juta m^3, luas daerah tenggelam 8,9 km^2 dengan debit banjir perencanaan 1.332 m^3/detik. Sedang kapasitas debit 764 m^3/detik, sementara luas daerah irigasi mencapai 3.500 Ha. Proyek Irigasi Jurangsate dengan saluran induk 16,50 km, bangunan air 20 buah dan bangunan pelengkap 30 buah, sedang saluran sekunder sepanjang 132,50 km.

Sementara itu, Proyek Suplesi Irigasi Renggung (HLD) terbagi menjadi 2 bagian, yaitu saluran suplesi Jangkok-Babak dan saluran Suplesi Babak-Renggung. Untuk saluran Suplesi Jangkok-Babak luas saluran dengan linning beton mencapai 10.450 m dan jalan inspeksinya 7.725 m. Sedang saluran Suplesi Babak-Renggung luas saluran dengan linning betonnya mencapai 12.700 m dan jalan inspeksi sepanjang 12.236 m.

Di wilayah Pulau Sumbawa, proyek Irigasi Lombok-Sumbawa meliputi daerah irigasi Mamak, untuk mengairi lahan pertanian seluas 4.900 hektar. Sedangkan yang menjadi sasaran utama dari proyek ini adalah daerah irigasi Moyo Komplek seluas 10.600 Ha, dengan perincian sebagai berikut : daerah irigasi Mamak Kanan dan Kiri (Mamak Upper Scheme) dengan target areal 3.900 Ha dari yang semula direncanakan hanya 2.900 Ha; Kakiang Kanan dan Kiri (Mamak Lower Scheme) 1.050 Ha, yang semula direncanakan hanya 350 Ha (Pongal kiri); Areal Irigasi Batu Bulan Kanan dan Kiri (Batu Bulan Upper Scheme) 2.300 Ha; Moyo Kanan dan Kiri (Batu Bulan Lower Scheme) 2.000 Ha, yang semula hanya 900 Ha (Moyo Kanan); dan Daerah Irigasi Pungkit Kanan dan Kiri seluas 1.350 Ha.

2. Sektor Industri

Jumlah industri pada tahun 1978 adalah sejumlah 1.582 buah industri, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 14.371 orang, jumlah modal kerja Rp1.206.689.350 dengan nilai produksi 5.819.589.063. Jumlah tersebut s/d triwulan 1 tahun 1983 telah meningkat menjadi 2.528 buah industri, dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 27.006 orang, jumlah modal kerja 4.370.488.530 dengan nilai produksi Rp3.248.427.284. (Lihat Tabel III - 10).

3. Sektor Transmigrasi

Program Transmigrasi ditujukan untuk menunjang usaha-usaha pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan pembagian pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Dalam hubungan ini, Transmigrasi membantu dan merangsang peningkatan pembangunan di daerah yang relatif masih terbelakang sehingga menjamin adanya keserasian dalam laju pertumbuhan antar daerah.

Program transmigrasi, selain mengurangi kepadatan penduduk di daerah-daerah tertentu juga memperluas landasan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan sektor lain, sehingga hasil yang diperoleh dapat dibagi lebih merata. Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah asal transmigrasi mulai tahun 1973 (Kepres Nomor 1 tahun 1973) sehingga sejak tahun itu dimulai pelaksanaan transmigrasi di Nusa Tenggara Barat.

Dari Pelita I tahun terakhir (1973/1974) hingga kini telah berhasil dipindahkan transmigrasi asal Pulau Lombok ke pelbagai lokasi proyek transmigrasi di Sulawesi, Kalimantan dan Maluku sebanyak 9.195 KK atau 39.438 jiwa.

Di samping itu, dalam rangka pengembangan dan perluasan areal perkebunan di NTB, oleh PT Perkebunan XXVII (PTP XXVII) telah dilakukan pelbagai penelitian di Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Dompu, untuk membuka Perkebunan Inti Rakyat dengan dukungan transmigrasi lokal. Dalam hubungan ini telah dipindahkan 1.700 KK, dengan perincian 800 KK dalam tahun 1981/1982, sebanyak 500 KK tahun 1982/1983, dan 400 KK pada tahun 1983/1984.

Satu jenis transmigrasi lainnya yang terdapat di NTB adalah transmigrasi swakarsa. Jumlah transmigrasi Swakarsa yang tercatat selama tiga tahun terakhir ini mencapai 74 KK terdiri dari 352 jiwa. Dengan tujuan ke lokasi proyek Transmigrasi Kalaina kiri (Sulawesi) Selatan) sebanyak 5 KK atau 30 jiwa, Mayoan (Sulawesi Tengah) sebanyak 11 KK atau 57 jiwa, Timonggea (Sulawesi Tenggara) sebanyak 3 KK atau 7 jiwa, Sebanban (Kalimantan Selatan) sebanyak 20 KK

Renggang Suplesi Irrigation project has two channel i.e. Suplesi Jongkok Babak and Suplesi Babak-Renggung. Width of Suplesi Jongkok Babak channel and concrete lining reaches 10.450 m and the inspection road reaches 7.725 m length. Width of channel and concrete lining of Suplesi Babak Renggung reaches 12.700 m and the inspection road of 12.236 m. length.

In Sumbawa insland, irrigation projects covering Mamak irrigation for 4.900 ha agricultural area. Main target area of this project is Moyo Komplek irrigation area of 10.600 ha, with following details: Mamak Upper Scheme with 3.900 ha coverage, wider than 2.900 planned Kakiang Kanan and Kiri (Mamak Lower Scheme) covering 1050 ha, while former plan was only 350 ha (Pongal Kiri). After expansion of former plan of 350 ha (Pongal Kiri), Batu Bulan Kanan and Kiri (Batu Bulan Lower Scheme) could cover 2000 ha (former plan 900 ha). Mojo Kanan and Kiri; and Pungkit Kanan Kiri Irrigation area covers 1.350 ha.

2. *Industrial Sector*

In 1978, there were only1.582 industries existed, they absorber employment of 14,371 labourers. Their working capital was Rp1.206.689.350 and their production value was 5,819,589,063. Up to first quarter the above amount increased to 2,528 industries, employment absorption of 27.00 labourers, working capital of 4,370,488,530 and production value of Rp3,248,427,284. See Table III – 10.

Tabel / *Table III - 10*
PERKEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979/1984
THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN WEST NUSA TENGGARA, 1979/1984

No	Tahun Year	Jumlah Perusahaan (buah) Number of companies	Penyerapan tenaga kerja (orang) Absorption of labour	Investasi Modal (Rp) Capital Investment	Nilai Produksi (Rp) Production Value
1	1979	1.643	14.946	3.300.375.550,-	8.480.378.590,-
2	1980	2.007	22.166	4.819.581.700,-	12.303.279.265,-
3	1981	2.301	25.415	7.698.016.390,-	13.561.887.360,-
4	1982	2.475	27.561	10.484.373.090,-	13.056.237.334,-
5	1983	2.617	24.114	12.521.329.713,-	16.469.477.607,-
6	1984	2.597	24.512	13.367.976.000,-	20.427.474.000,-

Sumber : Kanwil Dep Perindustrian Prop NTB.
Source : Ministry of Industry, West Nusa Tenggara Provincial Office.

3. *Transmigration Sector*

Transmigration programme is intended to support the government efforts in creating even distribution of development, income and employment opportunities. In this context, transmigration programme backed up and stimulated development in under-developed regions in order to create harmony in the development of inter-regions.

Besides reducing population density in several areas, transmigration programme also expanding basis for development in other sectors; to provide more even distribution of the results. Lombok islands has been designated as place of origin of the transmigrants since 1973 (Kepres. No 1, 1973). Based on this, since 1973 transmigration programme has been carried in West Nusa Tenggara.

Since last year of Pelita I until the present time, 9,995 families or 39,438 person from Lombok island were resettled in various transmigration sites in Sulawesi, Kalimantan and Maluku.

Apart from the above programme, in the framework of expanding the estates area in West Nusa Tenggara, PT Perkebunan XXVII (PTP XXII) has carried out various researches in Sumbawa island, especially in Kabupaten Dompu to open PIR with the support of local transmigrants. In this programme 1700 families were resettled i.e. 800 families in 1981/82, 500 in 1982/83 and 400 in 1983/84.

Another type of transmigration programme in West Nusa Tenggara is self-initiave transmigration. During the last three years this programme has been participated by 74 families consisting of 352 persons. Their destinations are transmigration projects in Kalaina Kiri (South Sulawesi, 5 families of 30 persons, Mayoan (Central Sulawesi) 11 families of 57 persons, Timonggea (South-East Sulawesi) 3 families or 7 persons, Sebanban (South Kalimantan) 20 families or 117 persons and Teluk Dalam (East Kalimantan 35 families or 141 persons. See Table III-11.

4. *Trade Sector*

Realization of export non-oil export commodities in 1981 amounted to US$ 1.429.469,63 but in 1982 it was only US$ 621.766.03 or decline by

atau 117 jiwa dan Teluk Dalam (Kalimantan Timur) sebanyak 35 KK = 141 jiwa. (Lihat Tabel III - 11).

4. Sektor Perdagangan

Realisasi ekspor komoditi non minyak dalam tahun 1981 sebesar US $ 1.429.469,64 sedangkan pada tahun 1982 menurun menjadi US $ 621.766,03 atau sebesar 56,52%. Turunnya nilai ekspor antara lain disebabkan adanya penurunan volume ekspor dari beberapa jenis komoditi ekspor seperti kayu Dua Banga Molucana, biji pinang katul dan biji mangan. Sedangkan turunnya volume ekspor adalah sebagai akibat dari tanaman komoditi ekspor sekarang ini bukan tanaman budidaya, akan tetapi hanya tanaman liar. Usaha-usaha untuk mengembangkan komoditi ekspor seperti kopi, pinang, jarak, jambu mente menjadi tanaman budidaya telah dikembangkan, namun dewasa ini belum menghasilkan.

Sedangkan usaha-usaha lain untuk meningkatkan ekspor komoditi non minyak juga dilaksanakan beberapa kegiatan seperti menggali komoditi-komoditi ekspor baru yang memiliki potensi ekspor yang cukup kuat seperti halnya kerang mutiara, udang beku, kayu mewah, beberapa jenis kerajinan rakyat dan kulit batang tembakau. Di dalam hal ini pengusaha-pengusaha barang kerajinan rakyat diikutsertakan dalam berbagai pameran dalam dan luar negeri bekerjasama dengan badan pengembangan ekspor nasional.

Pengusahaan kerang mutiara, udang beku dan kayu mewah ternyata memperlihatkan tanda-tanda menggembirakan.

Hingga 25 Juli 1986 dari daerah ini sudah diekspor komoditi non migas berupa produksi biji mutiara bulat dan setengah bulat, udang beku dan kayu mewah (jati dan klicang), sonokeling memasukkan devisa untuk negara sebesar US $ 1.081,22.

Untuk ekspor biji mutiara yang dikelola oleh PT Paloma Agung yang dalam tahun 1985 dengan berat 0,0054 ton senilai $ 66.393,42. Sementara dalam tahun 1986 meningkat menjadi 0,0253 ton dengan nilai $ 614.538,84. Jumlah keseluruhan ekspor kedua tahun itu mencapai $ 680.882,26 kesemuanya ke negara Jepang.

Sedang untuk ekspor udang beku dengan tujuan 10 negara Jepang dalam tahun 1986 berjumlah 67,058 ton dengan pemasukan sebesar $ 348.927,69. Pengelolaan usaha tersebut dilakukan oleh PT Senada Indah Kaya dengan wilayah pengusahaan di Teluk Cempi, P Sumbawa.

PT Jati Alam Lestari yang bergerak dalam bidang pengusahaan kayu mewah, dalam tahun 1986 volume ekspornya mencapai volume 100,3641 m3 bernilai $ 52.001,27. Dengan negara-negara tujuan ekspor Jepang, Italia, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura.

Perincian ekspor kayu tersebut adalah sebagai berikut : ke Jepang 12,3834 m3 senilai $ 7.430,04; Italia 15,0078 m3 senilai $ 6.643,48; Korea Selatan 15,2458 m3 senilai $ 10.650,00; Hongkong 25,0778 m3 senilai $ 6.520,23 dan Singapura 32,6493 m3 senilai $ 20.707,52 dengan jumlah keseluruhan ekspor sebesar 100,3641 senilai $ 52.001,27.

Di samping itu telah juga dikembangkan usaha memberikan penyuluhan tentang teknis perbankan, pemasaran dan asuransi kredit yang kesemuanya dimaksudkan untuk mempermudah para pengusaha guna mengembangkan usahanya di dalam berbagai komoditi ekspor.

Komoditi Ekspor Daerah Nusa Tenggara Barat bersumber dari sektor Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan. Pada tahun 1978 jumlah ekspor sebanyak 3.545,7 ton dan 67.480,84 m3 dengan nilai ekspor sebesar US $ 1.406.842,23. Pada tahun 1982 jumlah komoditi ekspor menurun baik jumlah komoditi ekspor maupun nilai ekspor, karena kurangnya volume-volume ekspor dari beberapa komoditi ekspor sehingga pada tahun 1982 ekspor Nusa Tenggara Barat hanya sebanyak 347,9 ton dengan nilai US $ 621.766,03. Sedangkan pada tahun 1983, jumlah ekspor Nusa Tenggara Barat sebanyak 437,3 ton dan 1.379 m3 kayu dengan nilai US $ 743.750,21 (s/d Nop. 1983). Lihat Tabel III-12.

Jumlah impor yang berupa barang modal dan barang pemerintah, pada tahun 1978 sebesar US $ 226.186,94 sejak tahun 1979 hingga saat ini sudah tidak ada lagi impor langsung karena kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang impor sudah bisa dipenuhi secara antar pulau.

Sementara itu, pembinaan di bidang perdagangan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya perusahaan perdagangan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 1978 jumlah perusahaan perdagangan sebanyak 4.377 perusahaan, terdiri dari perusahaan pribumi 2.279 dan perusahaan milik WNI 1.198 buah perusahaan. Tahun 1982, jumlah perusahaan tersebut meningkat menjadi 15.766 buah perusahaan yang terdiri dari perusahaan pribumi 14.123 buah dan perusahaan WNI 1.643 buah perusahaan. Sedangkan pada tahun 1983, telah menjadi 17.288 buah perusahaan pribumi dengan 15.579 buah dan WNI 1.709 buah perusahaan.

Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah

Dengan keluarnya Kepres Nomor 14 A tahun 1980 usaha membina golongan ekonomi lemah makin dikembangkan secara lebih man-

56,52%. The decline of exports value was due to decrease of some export commodities volume such Kayu Dua Bunga Molucuana, areca nut and manganese ore. The decline of volume was due to the fact that the commodities concerned are not cultivated but they are wildly grown. Efforts have been undertaken to cultivate these commodities including coffee, areca nut, castor, cashew nuts. So far they have not yielded yet.

Tabel / *Table III - 11*
PEMINDAHAN TRANSMIGRASI DARI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 1973 - 1983
RESSETLEMENT OF TRANSMIGRANTS FROM WEST NUSA TENGGARA 1973 - 1983

NO	TAHUN *Year*	KK *Families*
1	1973/1974	300
2	1974/1975	500
3	1975/1976	200
4	1976/1977	500
5	1977/1978	500
6	1978/1979	1.080
7	1979/1980	1.800
8	1980/1981	1.850
9	1981/1982	2.500
10	1982/1983	1.000
11	1983/1984	1.200
	Jumlah/*Total*	11.430

Efforts to increase export of non-oil commodities have been undertaken including looking for other commodities with good export prospects such as pearl mother, frozen shrimp, teakwood, handicrafts and skin of tobacco. In this context, in cooperation with National Agency for Export Development some entrepreneurs of handicrafts were invited to participate in various exhibitions in the country as well as abroad.

Cultivation of the pearl mother, frozen shrimp and teakwood has shown positive prospects.

Up to 25 July 1986, this region has exported non-oil commodities such as round and half-round pearl, frozen shrimp and teak & klincang, sonokeling and has resulted a devisa of US$ 1-081,22.

Pearls cultivated by PT Paloma Agung was exported to Japan in the total of 0,0054 tons with value of US$ 66,393,42 in 1985. In 1986, the export was increased to 0,0253 tons with value of US$ 614,538,84. Total export in 85 & 86 was $ 680,882,26.

Frozen shrimps was also exported to Japan. In 1986, 67.058 tons of frozen shrimps was exported with income of $ 348,927,69. This cultivation was done by PT Senada Indah Raya with area of operation in Teluk Cempi, Sumbawa Island.

In 1986, PT Jati Alam Lestari who deals with kayu mewah, in 1986, has exported 100,3641 m3 with a value of $ 52,001.27. Its ports of destination are Japan, Italy, South Korea, Hong Kong and Singapore

Details of log export are as follows: to Japan 12,3834 m3 with value $ 7,430.04; to Italy 15,0078 m3 with value of $ 6,643. 48; to south Korea 15,2458 m3 with value of $ 10,650.00; to Hong Kong 25,0778 m3 with value of $ 6.520,23 and to Singapore 32,6493m3 with a value of $ 20,707,52 while total export volume was 100,3461 with total value of $ 52,001.27.

Besides, above activities, extension services on banking operational practices, marketing and credit insurance have been developed with the purpose to facilitate the entreprenurs in expanding their operations in various export commodities.

Export commodities of West Nusa Tenggara province came from plantation, forestry, animal husbandry, fishery sectors. In 1978, total exports amounting to 3,545.7 tons and 67,480.84 m3 with export value of US$ 1,406,842.23. In 1982 the export value was declined in total number of commodities as well as in value due to the decline on the volume of export. West Nusa Tenggara export value in 1982 were only 347,9 tons with a value of US$ 743,750.21 (up to November 1983). See Table III – 12.

Importing of capital and governmental goods in 1978 reached to the amount of US$ 2,26,186.94. Since 1979 up to present, no direct import was carried out because needs of the people for imported goods were met by inter-islands trading.

Meanwhile, promotion of trade has shown positive prospects. This was shown by the increase in number of trade companies each year. In 1978, there were only 4,377 companies in West Nusa Tenggara consisting of 2,279 native-owned companies and 1,198 foreign-origin citizen (WNI) owned companies. In 1982, the total of companies in increasing to 15,766 consisting of 14,123 native-owned companies and 1,643 WNI-owned companied. In 1983 total number of companies came to 17,288 with 1,719 with 15,579 native-owned and 1,709 WNI owned.

tap lagi. Dalam hubungan ini telah diselenggarakan penyuluhan-penyuluhan serta latihan ketrampilan praktik, sehingga dapat diharapkan tumbuh dan berkembang jiwa kewiraswastaan. Pendekatan lain adalah melalui konsultasi sesuai dengan bidang usaha masing-masing.

Mekanisme penyaluran Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dikendalikan sedemikian rupa agar supaya sasaran yang diniatkan oleh bantuan permodalan tersebut dapat dicapai yang dalam hal ini adalah golongan ekonomi lemah. Usaha ternyata memberikan hasil yang positif yang ditandai dengan makin berkembangnya jumlah pengusaha golongan ekonomi lemah.

Pada tahun 1978 jumlah pengusaha golongan ekonomi lemah yang memperoleh Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen masing-masing sebanyak 1.260 pengusaha dan 1.886 pengusaha. Keadaan ini makin berkembang pada tahun 1981 sehingga pengusaha yang memperoleh Kredit Investasi Kecil meningkat menjadi sebanyak 6.194 pengusaha dan yang memperoleh Kredit Modal Kerja Permanen meningkat menjadi 12.238 pengusaha.

Selanjutnya untuk membantu pedagang kecil di pasar-pasar telah disalurkan pula Kredit Candak Kulak. Pada tahun 1979 jumlah nasabahnya telah mencapai 13.962 pedagang kecil dan pada tahun 1982 telah meningkat menjadi 22.526 pedagang kecil. Dengan demikian dalam periode tersebut jumlah pedagang kecil yang telah memperoleh pelayanan kredit candak kulak bertambah sebanyak 8.564 pedagang kecil.

Usaha lain dalam rangka pembinaan ini adalah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada golongan ekonomi lemah untuk berperan di dalam melaksanakan proyek-proyek Pemerintah sesuai dengan bidang kerja serta kemampuannya. Melalui Inpres pasar telah berhasil memberikan tempat usaha yang layak kepada 8.245 pedagang, baik dalam kios-kios maupun dalam los-los pasar.

Sedangkan terhadap pengusaha Industri kecil telah diberikan latihan keterampilan, bimbingan tehnik, bantuan peralatan serta promosi melalui pameran-pameran yang kesemuanya dimaksudkan untuk mendorong pengusaha industri kecil berkembang dengan pesat, sebab dengan berkembangnya industri-industri kecil, maka kesempatan kerja bagi masyarakat akan lebih terbuka.

Sementara itu pelaksanaan Kepres 14 A Tahun 1980 telah berjalan sebagaimana dimaksud oleh Kepres itu sendiri. Hal ini antara lain ditandai dengan telah dilaksanakannya beberapa kegiatan yang menunjang suksesnya pelaksanaan Kepres Nomor 14 A seperti telah ditetapkannya panitia prakualifikasi dan klasifikasi Tingkat Propinsi dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Mei 1980 Nomor 604/2.

Pada Tingkat Kabupaten telah dibentuk juga panitia yang sama dimana hasil panitia tingkat Kabupaten diteliti kembali oleh Panitia Tingkat I. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan Daftar Rekanan Mampu (DRM). Sebelum Daftar Rekanan Mampu (DRM) ditetapkan diawali dengan kegiatan penyusunan pemborong/rekanan golongan ekonomi lemah oleh masing-masing Kabupaten.

Pada tahun 1982/1983 jumlah rekanan yang terdaftar sebanyak 1.823 rekanan; di bidang konstruksi sebanyak 1.628 rekanan (pekerjaan sipil 1.575 rekanan, instalasi 18 rekanan dan konsultasi 35 rekanan) dan bidang pengadaan barang dan jasa sebanyak 195 rekanan.

5. Sektor Koperasi

Usaha-usaha yang telah dilakukan pada Sub Sektor Perkoperasian antara lain peningkatan kemampuan organisasi pendidikan tenaga perkoperasian, bimbingan dan pengembangan usaha perkoperasian serta pembinaan generasi muda dalam perkoperasian. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan tulang punggung perekonomian masyarakat.

Sebagai hasil dari pembinaan yang telah dilakukan maka jumlah koperasi telah berkembang dari 321 buah pada tahun 1979 menjadi 450 buah pada tahun 1982, termasuk 139 KUD. Demikian pula perkembangan jumlah anggota telah meningkat dari 44.713 orang pada tahun 1979 menjadi 685.460 orang pada tahun 1982. Terjadinya penambahan jumlah anggota yang begitu cepat dalam tahun 1982 disebabkan karena adanya Program Partasigana dimana kelompok-kelompok ekseptor yang dilayani Koperasi dimasukkan sebagai anggota Koperasi.

Dalam rangka membantu para pedagang kecil, KUD telah mengambil bagian di dalam penyaluran kredit candak kulak yang pada tahun 1979 nasabahnya sejumlah 13.962 orang. Pada tahun 1982 meningkat menjadi 22.526. Jumlah pinjaman yang telah disalurkan dalam tahun 1979 adalah Rp 309,9 juta dan pada tahun 1982 meningkat menjadi Rp 761,8 juta.

Di samping kegiatan ini KUD telah mengambil bagian di dalam penyaluran sarana produksi dan penyaluran hasil pertanian. Penyaluran sarana produksi yang telah dilakukan oleh KUD telah menunjukkan

Improvement of Puny-economic group

With the issuance of Kepres 14 A 1980, efforts to support puny economic group have been intensified substantively. In this context extension courses on practical matters were carried out to encourage the entrepreneurs. Other approach has been done through consultation in accordance with their activities.

Mechanism of channeling Small Investment Credit (KIK), Permanent Working Capital Credit (KMKP) has been arranged in such a way to facilitate the achievement of the objective of this facility. This effort has brought about positive result which was marked by increasing number of entrepreneurs from the puny economic group.

In 1978, total number of entrepreneurs received KIK and KMKP were 1260 and 1886 respectively. It was expanded in 1981 to 6,194 for KIK and 12,238 for KMKP.

Small vendors in the markets have enjoyed Small Vendors Credit (Candak Kulak). In 1979 total number of customers reached 13,962 and in 1982 it was incresed to 22,526 vendors. Total number in these two years reached 8,564 vendors.

Another effort to promote the participation of the small vendors to undertake the government projects in accordance with their specialities.

Inpres pasar facilitated decent pleaces to trade to 8.245 vendors in kiosks.

Extension curses on skill, technical as well as tools/equipment were provided to small scale industry workers to encourage their progress This means more employment opportunities existed.

Meanwhile, Kepres 14 1984 was implemented according to its content. Various activities in supports of the Kepres realization were carried out including the establishments of Provincial pra-qualification and qualification committes by the Governor Decision of 604/2, 24 May 1980. Same Committees were also established in kabupaten level. The result of the Committees in Kabupaten was reviewed by the Provincial Committees. Daftar Rekanan Mampu (DRM) was derived frim the Committees output. Before the DRM was decided, all puny economic group contractors were registered in each Kabupaten. In 1982/83, there were 1.823 contractors were registered; 1628 contractors on construction sector (civil works 1.575 contractors, installation 18 contractors and 38 consultants) and 195 contractors in supplies and service sector.

Tabel / *Table III - 12*
VOLUME EXPORT DAERAH NUSA TENGGARA BARAT PER SEKTOR PRODUKSI TAHUN 1979 - 1984
EXPORT VOLUME FROM WEST NUSA TENGGARA BY PRODUCTION SECTOR : 1979 - 1984

No	Sektor Produksi / *Production Sector*	Satuan / *Unit*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hasil Pertanian / *Agricultural products*	Ton	5,4	68,6	-	-	10,0	2.550,0
2	Hasil Perkebunan / *Estates products*	Ton	69,7	24,8	300,0	248,8	553,6	1.108,8
3	Hasil Peternakan / *Animal Husbandry*	Ton	12 0	-	-	-	-	-
4	Hasil Kehutanan / *Forestry products*	M^3	48.853,2	15.559,9	9.000,0	-	1.821,0	801,1
5	Hasil Laut / *Marine products*	Ton	28,8	15,1	-	-	13,0	-
6	Hasil Kerajinan / *Handicrafts*	Kodi	-	-	-	-	-	-
7	Hasil Tambang / *Mines*	Ton	-	-	5.500,0	-	-	-
8	Hasil Perikanan / *Fisheriees products*	Ton	-	-	17,1	99,1	-	40,2
9	Hasil Lain-lain / *Misc*	Ton	4.523,9	4.472,6	-	-	-	-
	Jumlah/*Total*	Ton	4.627,8	4.581,1	5.817,1	347,9	576,6	3.699,0
		Ton	12,0	-	-	-	1.821,0	801,1
		M^3	48,853,2	15.559,9	9 000,0	-	-	-

5. Cooperative Sector

Various efforts were carried out in Cooperative sub-sector including strengthening training institutes for cooperatives mampower, assistance to develop cooperative unit and encouraging youth participation in cooperative unit. All efforts are intended to make cooperative as the back bone of the people's economy.

As the result of the promotion effort mentioned above, number of cooperative units have increased from 321 in 1979 to 450 in 1982 including 139 Rural

hasil-hasil yang cukup menggembirakan yakni Pupuk Urea, TSP, DAP yang tersalur pada tahun 1979 masing-masing sejumlah 3.100,02 ton; 238,43 ton; 10,29 ton. Sedangkan pada tahun 1982 masing-masing 13.079,644 ton Urea dan 2.437,492 ton TSP. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengolahan hasil pertanian dengan pembangunan lantai jemur sejumlah 114 buah pada tahun 1979 dan telah bertambah menjadi 191 buah pada tahun 1982. (Lihat Tabel III - 13).

Dalam pengadaan pangan stock Nasional di Nusa Tenggara Barat, pembelian gabah/beras sebagian besar dilaksanakan melalui koperasi (KUD). Untuk pengadaan 1981 saja peranan KUD adalah sebesar 88,5%. (Lihat Tabel III - 14).

Perkembangan lainnya yang menggembirakan di bidang Berkoperasian ialah adanya Koperasi Kelistrikan Desa di Aikmel Kabupaten Lombok Timur yang telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan. Pada tahun 1980 yang dijangkau hanya 3 desa yaitu Desa Aik Mel Lenek dan Anjani dengan jumlah langganan 1.055 KK. Pada tahun 1981 telah meningkat menjadi 4 desa yaitu Desa Kalijaga sebagai tambahannya dan jumlah langganan telah mencapai 2.021 KK.

Di samping adanya Koperasi Kelistrikan Desa ini dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan industri rumah tangga seperti antara lain : Penetasan telur, pembuatan es dan industri meubelair.

Cooperative Units (KUD). Same has happened to the membership, from 44.713 in 1979, it has come to 685.400 members in 1982. Rapid increase of the membership was due to Partasigana Programme where family planning acceptors served by the cooperative units became members of the said cooperatives.

In connection with assistance to the small vendors, KUD has participated in channeling small investors credit. Total number of customers in 1979 was 13,962. It was increased to 22,526 customers in 1982. Total credit distributed to them Rp309,9 million in 1979 and Rp761,8 million in 1982.

Besides this activity, KUD has been active in channeling production tools and agricultural products. Good prospect of KUD participation in these efforts have been proved i.e. in 1979 3,100,02 tons urea, 238,43 tons TSP and 10,29 tons of DAP were distributed, while in 1982, the total number was increased to 13,079,644 tons urea, 2437,492 tons TSP. In processing agricultural products, 114 drying field areas were constructed in 1979 and the total number became 191 in 1982. In provision of national rice stock pile in West Nusa Tenggara, purchase of rice/unhusked rice was undertaken through KUD.

For 1981 stock, KUD's role in purchasing rice was 88.5%. See Tables III–13 and III–14.

Tabel / *Table III - 13*

PENGELUARAN PUPUK DAN PESTISIDA OLEH KUD SELAMA PELITA III DI NUSA TENGGARA BARAT

THE DISTRIBUTION OF FERTILIZER AND PESTICIDE DURING PELITA III IN WEST NUSA TENGGARA

No	Kabupaten *District*	1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983		1983/1984	
		KUD *KUD*	Real (Ton)	KUD *KUD*	Real (Ton)	KUD *KUD*	Real (Ton)	KUD *KUD*	Real (Ton)	KUD *KUD*	Real (Ton) *Rice (ton)*
1	Lombok Barat/*West Lombok*	16	7.325,000	17	9.676,000	18	9.368,000	20	7.986,000	19	1.236,525
2	Lombok Tengah/*Central Lombok*	18	6.370,000	21	7.822,000	24	9.192,000	24	-	14	25.237,133
3	Lombok Timur/*East Lombok*	20	73.648,055	22	63.267,825	22	30.356,335	24	4.500,152	4	121,164
4	Sumbawa	16	784,432	16	1.271,295	16	1.207,355	16	-	16	98,514
5	Dompu	6	196,807	12	452,650	12	531,769	14	-	6	58,300
6	Bima	12	936,132	17	1.059,651	18	2.577,035	20	4.375,242	18	282,431
7	Propinsi/*Province*	1	4.186,438	1	4.050,530	1	5.605,133	1	4.547,51	-	-

Sumber : Kanwil Koperasi Prop Dati I NTB.

Source : Ministry of Cooperatives, West Nusa Tenggara Provincial Office

Tabel / *Table III - 14*

PERKEMBANGAN PENGADAAN PANGAN OLEH KUD/KOPERASI SELAMA PELITA III DI NUSA TENGGARA BARAT

THE DEVELOPMENT OF FOOD SUPPLY BY KUD/COOPERATIVES DURING PELITA III IN WEST NUSA TENGGARA

No	Kabupaten *District*	Jumlah KUD/Koperasi dan beras per-tahun ***Number of Cooperatives/KUD and supply of rice/per year***									
		1979		1980		1981		1982		1983	
		KUD *KUD*	Beras (ton) *Rice (ton)*	KUD *KUD*	Beras (ton) *Rice (ton)*	KUD *KUD*	Beras (ton) *Rice (ton)*	KUD *KUD*	Beras (Ton) *Rice (ton)*	KUD *KUD*	Beras (ton) *Rice (ton)*
1	Lombok Barat/*West Lombok*	14	2.966,100	16	24.356,320	16	31.083,142	15	18.073,100	19	12.019,264
2	Lombok Tengah/*Central Lombok*	17	2.041,000	14	7.860,000	19	19.053,000	24	17.581,000	14	20.149,982
3	Lombok Timur/*East Lombok*	17	1.465,534	19	15.064,368	17	24.645,389	20	21.513,101	22	13.015,322
4	Sumbawa	9	478,622	9	2.526,262	11	4.589,415	19	6.021,753	20	5.948,016
5	Dompu	1	80,023	5	432,233	8	2.276,500	8	2.452,105	8	1.920,957
6	Bima	5	265,631	10	736,237	14	6.717,000	18	10.319,800	11	3.506,495
	Jumlah/*Total*	63	7.296,910	73	50.975,420	85	88.364,446	104	75.960,859	84	56.560,036

Sumber : Kanwil Koperasi Prop Dati I NTB

Source : Ministry of Cooperatives, West Nusa Tenggara Provincial Office.

6 Sektor Perhubungan dan Pariwisata

Pembangunan dibidang Perhubungan dan Pariwisata mempunyai peranan yang semakin menonjol sebagai penunjang kegiatan lainnya. Oleh karena itu pembangunan sektor perhubungan dan Pariwisata diarahkan kepada pengadaan Sarana.

Panjang seluruh jaringan jalan dan jembatan di Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Other good prospect in this cooperative sector was Rural Electricity Cooperative in Aikmail, Kabupaten of East Lombok which were noted for its development and progress. In 1983, only 3 village such as Aik Mel, Lenek, Anjani with 1.055 customers covered.

In 1981, it reached 4 villages with the inclusion of Desa Kalijaga village in the programme and number of customers increased to 2,021. The electricity were also used for home industry development including eggs hetching, ice making and furniture industry.

Jalan : 2.213 km terdiri dari jalan Negara 486 km, jalan Propinsi 430 km, jalan Kabupaten 1.297,25 km.

Jembatan : 8.939 meter terdiri dari jembatan Negara 2.582 meter, jembatan Propinsi 2.996 meter, jembatan Kabupaten 3.361 meter.

Dengan telah direhabilitasinya jalan dan jembatan, maka pada tahun 1978 keadaan jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik 27% sedang 26% dan rusak/buruk 47%, Usaha penunjangan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan semakin ditingkatkan sehingga tahun 1982/1983 kondisi jalan dan jembatan prosentasenya semakin meningkat yaitu baik 63,35% sedang 33,57% dan buruk 3,08%.

Peningkatan jalan dan jembatan telah meningkatkan pergerakan orang dan barang dengan daerah jangkauan yang makin meluas. Bersamaan dengan itu, pertambahan sarana angkutan jalan raya dari tahun ke tahun baik berupa bus, mobil barang, penumpang maupun sepeda motor menunjukkan kenaikan-kenaikan. Dari tahun 1978 s/d 1982/1983 menunjukkan prosentase kenaikan rata-rata pertahun 25%. Di samping itu, telah pula diadakan pembangunan fasilitas-fasilitas angkutan jalan raya berupa alat pengujian, jembatan timbang, lampu pengatur lalu lintas dan lampu penyeberangan.

Pada tahun 1978/1979 jumlah bus, truck/mobil barang, mobil pengangkutan penumpang dan sepeda motor jumlahnya berturut-turut 366 buah, 3.201 buah, 1.745 buah dan 14.968 buah, atau jumlah keseluruhan adalah 16.557 buah. Sedangkan pada tahun 1982/1983, jumlah tersebut telah menjadi 46.601 buah yang terdiri dari bus 1.081 buah, truck/mobil barang 6.085 buah, mobil pengangkut penumpang 2.883 buah dan sepeda motor 33.034. Lihat Tabel III-15).

Sub Sektor Perhubungan Laut

Pembangunan di bidang perhubungan laut diarahkan kepada peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang perhubungan sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pengangkutan laut.

Fasilitas perhubungan laut di Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
- Pelabuhan Kelas III 1 buah
- Pelabuhan Kelas IV 2 buah

Tahun 1978 keadaan fasilitas perhubungan laut terdiri dari :
- Dermaga beton 114 meter
- Dermaga kayu 90 meter
- Gudang 3.925 meter
- Lapangan penumpukan 11.000 meter
- Fork Lift 3 buah

Dengan fasilitas tersebut pada tahun 1978 telah mampu melayani bongkar muat barang sebanyak 407.087 ton/tahun. Penyempurnaan fasilitas pembangunan perhubungan laut tersebut makin ditingkatkan. Pada tahun 1982/1983 fasilitas pelabuhan laut adalah sebagai berikut :
- Dermaga 230 meter
- Dermaga kayu 90 meter
- Gudang 3.925 meter

Bongkar muat barang meningkat menjadi 564.576 ton atau naik 38,69%, jumlah kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan tersebut pada tahun 1978 sebanyak 1.275 dan pada tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 2.257 buah, atau naik 77,01% (Lihat Tabel III - 16).

Sub Sektor Perhubungan Udara

Nusa Tenggara Barat mempunyai 4 buah fasilitas pelabuhan Udara yang terdiri dari :
- Klas II 1 buah
- Klas III 2 buah
- Perintis 1 buah

Pelabuhan Udara Klas II sudah mampu didarati oleh Foker 28 sedangkan pelabuhan Udara Klas III sudah mampu didarati Foker 27. Perkembangan jasa angkatan Udara yang makin meningkat juga meningkatkan jumlah penumpang maupun jumlah muat barang melalui pelabuhan Udara. Tahun 1987 jumlah penumpang pesawat Udara 68.311 dan jumlah barang 496.396 Kg. Sedangkan pada tahun 1982/1983, jumlah penumpang pesawat maupun jumlah bongkar muat meningkat menjadi 128.133 orang dan jumlah barang 551.082 Kg. Lihat Tabel III-17).

Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi

Masyarakat semakin menyadari pentingnya komunikasi Pos. Untuk itu pelayanan melalui Pos dan Giro selalu ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan dilakukan dengan memperluas jaringan pelayanan Pos dan Giro dengan membangun Kantor Pos, Kantor Pembantu di Kecamatan-kecamatan serta menambah jumlah trayek Pos Keliling.

6. Communication and Tourism Sector

Development of communication and tourism has a significant role in supporting other development activities. For this purpose, the development of communication and tourism sector is aimed at the facilities availability.

Length of roads network and bridges in West Nusa Tenggara are as follows:

Road: 2,213 km. consisting of State Road – 486 km, Provincial Road 430 km and Kabupaten Road – 1,297 km.

Bridges: 8,939 meters length consisting of State bridges – 2,582 m, Provincial bridges – 2,996 m, and Kabupaten bridges – 3,361 m.

After the rehabilitation works, in 1978, situation of roads network and bridges was as follows: 27 % in good condition, 26 % in moderate and 47 % damage. Rehabilitation efforts were intensified in 1982/83, the situation were improved to 63,35 % – good 33,57% – moderate and 3,08 % – damage.

The expansion of roads network and bridges were resulted in increasing of people and goods movement. Same case also happened in the transportation facilities, for example, bus, trucks and motor cycle. Numbers were increased 25%/year during 1978 - 1982/1983. Other facilities needed for road transportation such as standaridaztion equipment, bridges scale, traffic lights were provided.

In 1978/1979 number of bus – 366, truck – 3,201, public transportation 1,745 and motor cycle 14,968 of total 16,557 transportation means. In 1982/1983, the total number reached 46,601 transportation means consisting of 1,081 buses, 6,085 trucks, 2,283 public transportation and 33,034 motor cycles. See Table III – 15.

Tabel / *Table III - 15*

BANYAKNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERCATAT DI DAERAH NTB MENURUT JENIS KENDARAAN SELAMA TAHUN 1979 s/d TAHUN - 1984

NUMBER OF VEHICLES REGISTERED IN WEST NUSA TENGGARA ACCORDING TO VEHICLE'S TYPE DURING 1979 - 1984

No	Jenis / *Type*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1	Mobil Penumpang / *Passenger's bus*	1.745	1.923	2.359	2.883	3.260	3.505
2	Mobil Barang / *Trucks*	3.352	4.357	5.354	6.085	6.527	7.080
3	Bus / *Bus*	474	632	903	1.081	1.284	1.250
4	Sepeda Motor / *Motor cycle*	14.968	17.003	25.764	33.034	38.596	41.316

Sumber : Komdak Kepolisian NTB

Source : Police Area Command, West Nusa Tenggara

Sea-Communication Sub-sector

Development of sea communication is intended in improving facilities as well as supporting facilities to enable meeting the public needs of sea communication.

Sea communication facilities in West Nusa Tenggara are as follows :

Third class port 1
Fourth class port 2

In 1978 the situation of sea communication facilities consisting of:

dermage beton – concrete buth
dermage kayu – wooden berth
Storage – 3,925 meters

Lapangan penumpukan 11,000 meters
Forklift 3

With there facilities, in 1978, West Nusa Tenggara managed to carry out loading/unloading of goods amounting to 407,087 tons/year. Improvement and development of sea communication facilities were intensified. In 1982/1983 facilities of sea-ports were as follows :

Concrete berth 230 meters
Wooden berth 90 meters
Storage facilities 3,95 meters

Loading/unloading of goods were increased to 564,576 tons or increased by 38,69%; total number of ships using port facilities in 1978 were 1,275 and in 1982/1983 numbers were increased to 2,257, or increased by 77,01%. See Tabel: III – 16.

Sub-sector of Air Communication

West Nusa Tenggara has 4 airports facilities, consisting of:
Second clas 1

Pada tahun 1978 telah selesai dibangun kantor Pos Pembantu sebanyak 3 buah. Untuk meningkatkan pelayanan Pos Keliling pada tahun 1978 fasilitasnya telah ditambah berupa 7 buah kendaraan roda dua dan pemasangan 27 buah Box Surat. Pada tahun 1982/1983 jumlah fasilitas pelayanan Pos telah meningkat yaitu, Kantor Pos telah meningkat menjadi 4 buah, Kantor Pos Pembantu menjadi 20 buah, kendaraan roda dua 16 buah serta box surat 48 buah. Sejalan dengan peningkatan sarana, meningkat pula produksi jasa Pos dan Giro.

Di samping hal-hal tersebut di atas, pembangunan fasilitas telekomunikasi telah banyak bermanfaat bagi tercapainya program pemerataan pembangunan. Pada tahun 1978 kapasitas sambungan dari telepon manual sebanyak 3.380 sambungan, dengan sambungan induk 2.537 buah dan sambungan cabang 6 buah, maka pada tahun 1982/1983 kapasitasnya semakin meningkat. Di samping itu telah dibangun Sentra Otomat dengan kapasitas 4.000 line unit yang terdiri dari :

- Mataram : 3.000 line unit
- Sumbawa Besar : 1.000 line unit

Tabel / *Table III - 16*

BANYAKNYA KAPAL YANG BERKUNJUNG DI PELABUHAN LEMBAR, LOMBOK, ALAS, BADAS, DEMPO, BIMA DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT MENURUT KEGIATAN TAHUN 1979 - 1983

NUMBER OF SHIPS VISITED PORTS OF LEMBAR, LOMBOK, ALAS, BADAS, DEMPO, BIMA IN WEST NUSA TENGGARA ACCORDING TO ACTIVITIES 1979 - 1983

Pelabuhan Laut/Kegiatan *Port/Activity*	TAHUN / *YEAR* 1979	1980	1981	1982	1983
1	2	3	4	5	6
LEMBAR :					
1 Banyaknya Kapal *Number of ships*	1.286	1.470	1.510	1.394	750
2 D W T	364.875	510.480	599.553	1.077.919	479.699
3 Barang (ton)					
Bongkar *Goods (tons) Unloading*	90.307	140.618	244.298	248.635	234.788
Muat *Loading*	60.441	65.687	65.687	-	58.376
4 Penumpang (org). *Passengers (Number of persons)*					
Turun *Disembarkation*	64.885	73.478	99.401	95.689	20.465
Naik *Embarkation*	69.519	71.092	98.809	99.957	25.041
5 Hewan (ekor) *Animal (Number)*					
Turun/*Disembarkation*	-	-	-	3.176	-
Naik *Embarkation*	14.354	12.154	10.611	6.331	14.194
PELABUHAN LOMBOK : PORT LOMBOK					
1 Banyaknya Kapal *Number of ships*	1.467	1.337	1.336	1.075	1.373
2 D W T	32.408	41.998	66.471	86.630	96.200
3 Barang (ton) *Goods (tons)*					
Bongkar *Disembarkation*	1.761	1.509	1.997	1.881	2.496
Muat *Embarkation*	10.696	4.442	2.029	2.478	2.329
4 Penumpang (org) *Passenger (No of persons)*					
Turun/*Disembarkation*	52.540	68.529	10.572	103.532	99.377
Naik/*Embarkation*	64.355	82.008	109.342	106.431	107.714
5 Hewan (ekor) *Animal (Number)*					
Turun/*Disembarkation*	2.046	323	605	860	1.398
Naik/*Embarkation*	277	1.887	619	497	310
PELABUHAN ALAS/PORT ALAS					
1 *Banyaknya kapal Number of ships*	-	-	-	134	1.074
2 D W T	-	-	-	20.332	206.692
3 Barang (ton) *Goods (tons)*					
Bongkar/*Disembarkation*	-	-	-	3.513	4.089
Muat *Embarkation*	-	-	-	1.440	3.362
4 Penumpang (orang) *Passengers (persons)*					
Turun/*Disembarkation*	-	-	-	114.458	108.535
Naik *Embarkation*	-	-	-	107.371	112.207
5 Hewan (ekor) *Animal (number)*					
Turun *Disembarkation*	-	-	-	1.705	104
Naik/*Embarkation*	-	-	-	1.822	962
BADAS					
1 Banyaknya kapal *Number of ships*	-	549	468	603	599
2 D W T	-	60.395	77.845	136.573	150.321
3 Barang (ton) *Goods (tons)*					
Bongkar/*Disembarkation*	-	43.746	32.335	50.670	61.427
Muat/*Embarkation*	-	26.666	20.735	31.337	34.574
4 Penumpang (orang) *Passengers (person)*					
Turun/*Disembarkation*	-	3.109	1.740	-	-
Naik/*Embarkation*	-	2.694	1.258	261	255
5 Hewan (ekor) *Animal (Number)*					
Turun/*Disembarkation*	-	749	-	-	-
Naik/*Embarkation*	-	4.033	-	3.955	7.066
DEMPO					
1 Banyaknya kapal *Number of ships*	73	22	22	77	42
2 D W T	417.248	27.001	17.765	759	1.006
3 Barang (ton) *Goods (tons)*					
Bongkar/*Unloading*	48	4	177	18	5.499
Muat/*Loading*	1.021	-	465	273	-
4 Penumpang (orang) *Passenger (persons)*					
Turun/*Disembarkation*	121	19	-	-	-
Naik/*Embarkation*	268	26	-	-	-
5 Hewan (ekor) *Animal (Number)*					
Turun/*Disembarkation*	-	-	-	-	-
Naik/*Embarkation*	-	-	-	-	-
BIMA					
1 Banyaknya kapal *Number of ships*	612	925	916	976	776
2 D W T	134.402	228.876	303.730	408.260	157.217
3 Barang (ton) *Goods (tons)*					
Bongkar/*Unloading*	37.986	8.934	53.164	62.827	57.809
Muat/*loading*	17.382	83.382	28.908	20.723	21.113
4 Penumpang (orang) *Passenger (number of persons)*					
Turun/*Disembarkation*	696	2.703	1.550	1.003	3.123
Naik/*Embarkation*	733	1.705	2.225	1.859	2.817
5 Hewan (ekor) *Animal (number)*					
Turun/Disembarkation	-	-	-	-	-
Naik/*Embarkation*	-	-	-	-	-

Third class	*2*
Pioneer	*1*

The second class airport could be used by Fokker 28 landing while third class airport could be used by Fokker 27. Improvement of air communication service brought about increase of passengers and goods. In 1987, total passengers 68,311 and goods 496,396 kgs. In 1982/1983, total passengers reached the number 128,133 persons and total goods reached 551,082 kgs. See Table III–17.

Post and Telecommunication sub-sector.

The public have become more aware of importance of communicating by post. Efforts to enhance post office services are carried out through expansion of the post Office services network by constructing new post offices at regencies and sub-districts and by increasing number of routes for Rowing postmen service.

The provincial administration has constructed 3 post offices in subdistricts in 1978. Besides 27 letter boxes have been installed and 7 motor cycles are made available to improve the services of roving postmen. The number of post facilities has increased considerably in 1982/1983 fiscal year to 4 regency-class post offices, 20 sub-district class post offices, 16 motor cycles and 48 letter boxes.

Accordingly, the post office services have also improved. In addition to that, construction of telecommunications facilities has helped attaining equity of development.

In 1978, the province had only manual telephone capacity of 3.380 lines consisting 2.537 central lines and 6 branch lines. In 1982/1983 fiscal year the number of lines had increased with the construction by the Telecommunications office of an automative Central project with a line capacity of 4.000 line

Sub Sektor Pariwisata

Penyelenggaraan Jasa Pariwisata selain dapat menciptakan lapangan kerja juga dimaksudkan untuk memperkenalkan keindahan alam dan seni budaya sehingga dapat memupuk rasa kesatuan dan persatuan di satu pihak dan dilain pihak dapat menumbuhkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Arus wisatawan asing yang mengunjungi Daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 1978 sejumlah 970 orang, pada tahun 1982/1983 arus wisatawan asing meningkat menjadi 4.460 orang.

Selaras dengan perkembangan arus wisatawan asing tersebut, maka dilakukan usaha peningkatan fasilitas pelayanan yang berupa industri perhotelan, biro perjalanan dan cara pemberian ijin. Pada tahun 1978, jumlah penginapan sebanyak 29 buah dan pada tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 45 buah penginapan dan 5 buah hotel. Lihat Tabel III-18.

Walaupun Pulau Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak termasuk dalam kategori 10 Daerah Tujuan Wisata (DTW) dalam Pengembangan Pariwisata Nasional, namun bukan berarti di daerah ini tidak terdapat obyek wisata yang dapat ditonjolkan. Selama ini umumnya orang hanya mengenal Pulau Bali (Dewata) untuk tujuan wisata yang dikehendaki. Ini dapat dimaklumi, sebab pulau Bali namanya sudah cukup dikenal di dunia Internasional. Tetapi sesungguhnya belumlah lengkap bila wisatawan tidak meninjau P. Lombok misalnya, yang masih merupakan satu rangkuman kesatuan dari Kepulauan Nusa Tenggara (NUSRA).

Atau bukan ke Pulau Sumbawa yang banyak terdapat peninggalan bersejarah, seperti bekas Istana Raja. Dan peternakan lebah madu, serta pemandangan pantainya yang serba alami.

Banyak orang yang mengatakan, kalau ingin melihat obyek wisata yang serupa dengan di Bali dan masih bersifat murni (perawan) maka berkunjunglah ke obyek wisata yang banyak terdapat di NTB. Ini memang tidak berlebihan atau terlalu mengada-ada, mengingat daya tarik obyek-obyek wisata NTB, antara lain seperti yang disajikan dibawah ini.

a *Taman Mayura di Cakranegara.*

Taman Mayura merupakan sebuah taman dengan kolamnya yang indah. Taman bekas peninggalan sejarah yang dibangun pada tahun 1744 oleh AA Ngurah Karangasem, di tengah-tengah terdapat bangunan "Bale Kambang" yang pada zaman dahulu dipergunakan sebagai tempat pengadilan atau tempat pertemuan penting. Perpaduan budaya Hindu dan Islam dapat dilihat pada bentuk arsitek bangunan "Bale Kambang" dimana terdapat pula patung "Haji".

b *Taman Narmada.*

Taman Narmada adalah sebuah taman raja yang indah dan sejuk, dengan pepohonan serta kolam-kolamnya. Taman Raja ini dibangun tahun 1729 di masa Kerajaan Mataram oleh AA Ngurah Karangasem. Nama Narmada diambil dari sebuah nama sungai yang dianggap suci di India. Taman ini dibangun menurut pola puncak Rinjani dengan "Segara Anaknya" (Danau). Di Taman ini terdapat pula sebuah pura yang suci, yaitu Pura Kalasa sebagai tempat memuja Dewa Syiwa. Tiap tahun diadakan upacara Pujawali di Pura Kalasa untuk memuja Batara yang berkuasa di Puncak Gunung Rinjani. Upacara Pujawali ini berhubungan dengan upacara Pakelam, yaitu melabuhkan benda-benda emas ke dalam Danau Segara Anak di Gunung Rinjani.

Selain sebagai Taman Raja, taman Narmada telah dikenal dengan sumber air yang dapat dijadikan obat "Air Awet Muda" bagi yang meyakininya. Taman Narmada terletak sekitar 12 Km dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

c *Pura Miru.*

Pura Miru yang terletak di Cakranegara dibangun tahun 1720 pada masa kerajaan Singosari di bawah Pemerintahan AA Made Kerang. Pura tersebut merupakan lambang persatuan umat Hindu di Lombok dan memiliki 3 buah bagian halaman. Halaman luar terdapat rumah kentongan, dimana kentongan berguna untuk memanggil umat hindu yang hendak mengadakan upacara suci. Halaman yang kedua terdapat 2 buah rumah besar dengan panggung yang tinggi sebagai tempat menyiapkan sesajen. Sedangkan pada halaman ketiga terdapat 3 buah Miru.

Bangunan Miru yang ditengah, atapnya bersusun 11 sebagai tempat Sang Hyang Parama Ciwa. Miru yang di sebelah selatan bertingkat 7 sebagai tempat Sang Hyang Padra (Brahma) dan yang di sebelah utara bertingkat 9 sebagai tempat Sang Hyang Sada (Wisnu). Di dalam halaman ketiga pada Pura Miru ini terdapat 33 buah sanggar tempat memuja Batara (Awatara).

d *Pura Lingsar.*

Pura Lingsar merupakan sebuah kompleks pura suci bagi umat beragama Hindu. Di dalam kompleks Lingsar, terdapat pura Umat

units :

- *3.000 line units for Mataram*
- *1.000 line units for Sumbawa Besar.*

Tabel / *Table III - 17*

LALU LINTAS PESAWAT, PENUMPANG DAN BARANG DI PELABUHAN UDARA SELAPARANG (LOMBOK) DAERAH NUSA TENGGARA BARAT THN 1979 — 1984

THE TRAFFIC OF FLIGHT, PASSENGERS AND GOODS AT SELAPARANG AIRPORT (LOMBOK), WEST NUSA TENGGARA 1979 - 1984

No	JENIS *TYPE*	TAHUN/*YEAR*					
		1979	1980	1981	1982	1983	1984
1	Pesawat (buah)/*Flight*						
	- Datang/*Arrival*	-	1.669	2.699	1.808	1.711	2.182
	- Berangkat/*Departure*	-	1.669	2.699	1.808	1.711	2.182
2	Penumpang (orang)/ *Passenger (People)*						
	- Datang/*Arrival*	-	47.797	49.101	54.548	42.409	46.204
	- Berangkat/*Departure*	-	51.883	56.157	59.231	48.559	51.851
3	Barang (kg)/*Cargo*						
	- Bongkar/*Unload*	-	379.559	351.025	287.884	258.630	286.611
	- Muat/*Load*	-	125.514	110.881	137.837	188.529	244.511
4	Transit (orang) / *Transit (people).*	-	3.907	5.653	8.643	9.459	18.393
5	Bagasi/*Baggage* (kg)						
	- Bongkar/*Unload*	-	381.334	388.769	381.304	314.486	365.689
	- Muat/*Load*	-	297.709	302.924	303.999	322.565	483.985
6	Paket/*Package* (kg)						
	- Bongkar/*Unload*	-	41.689	54.744	60.434	63.907	75.021
	- Muat/*Load*	-	23.418	30.689	40.436	58.609	85.770

SUMBER *Pelabuhan Udara Selaparang*

Source : Selaparang Airport.

Tourism Sub-sector

The development of tourism, besides creating employment opportunity is also aimed at introducing the beauty of local culture and nature, increasing local people's income and helping strengthen sense of unity among local people.

The flow of foreign tourists visiting the Nusa Tenggara Barat province has sharply increased from 970 foreign tourists in 1978 to 4.460 foreign tourists in 1982/1983 fiscal year.

Paralel with the increase in the number of foreign tourists visiting the area, the administration has done a great deal to improve tourist facilities such as hotel industry, travel operation and licensing. The province has in 1982/1983 45 lodging houses and 5 hotels, while in 1978 it had only 29 lodging houses. See Table III – 18.

Despite the fact that the province is not included in the 10-Tourist Destination area Category of the National Tourism Development, this does not imply that the area has magnificent tourist objects to offer to outside world. People so far only know island as much-coveted tourist destination. This is understandable as the paradise island of Bali has an international reputation. But it should be noted that it is uncomplete for tourists visiting Bali island unless they also visit Lombok island for instance as they two make up the Nusa Tenggara archipelago.

It is Sumbawa island which enhirated such a historical remains like former Royal palace. honeybee breeding and scenery of beautiful beaches.

There is people saying that goes like this : If you want to see tourist objects similar to those of Bali but still remain virgin, then come to the NTB province for them. It is no exageration as the province has its beautiful tourist objects with their own attractive power.

a. Mayura Garden at Cakranegara

Major attraction of Mayura Garden is its beautiful lake. Built in 1744 by Anak Agung Karangasem, Mayura garden has a unique building at its centre celled "Bale Kembang", which was used as a court or place for important gatherings.

A combination of Islamic and Hindu cultures is clearly seen from the Bale Kembang architecture which has "Haj" statue.

Hindu, serta kompleks Kemali bagi umat yang masih menganut ajaran agama "Islam Wetu Telu". Setahun sekali di kompleks Pura Lingsar diadakan upacara perang ketupat yang dilaksanakan oleh Umat Islam Wetu Telu.

Setelah mereka mengadakan upacara memuja di pura dan kemali, masing-masing dilanjutkan dengan upacara perang ketupat dengan saling melemparkan ketupat. Perang ketupat diadakan pada waktu menjelang musim penanaman padi. Diharapkan dengan upacara tersebut hujan akan turun cukup banyak dan hasil panen mereka akan semakin berlimpah. Bangunan Pura Lingsar didirikan tahun 1714 dan terletak sekitar 10 Km dari Kota Mataram Lombok.

Tabel / *Table III - 18*

BANYAKNYA WISATAWAN ASING YANG BERKUNJUNG KE DAERAH NUSA TENGGARA BARAT MENURUT KEBANGSAAN TAHUN 1980 - 1984.

NUMBER OF FOREIGN TOURISTS VISITING THE NTB PROVINCE IN 1980 - 1984/BY NATIONALITIES

No	Kebangsaan *Nationality*	1980 *1980*	1981 *1981*	1982 *1982*	1983 *1983*	1984 *1984*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jerman/*German*	183	181	467	700	1.183
2	Swiss	32	36	213	185	334
3	Australia	41	33	1.509	1.946	1.015
4	Belanda/*Netherlands*	26	25	400	954	679
5	Singapura/*Singapore*	5	7	24	94	40
6	Canada	12	8	108	184	145
7	Selandia Baru/*New Zealand*	5	11	47	199	103
8	Inggris/*United Kingdom*	19	24	282	348	268
9	Belgia/*Belgium*	1	4	61	168	74
10	India	6	2	25	25	5
11	Denmark	3	4	15	12	64
12	Perancis/*France*	21	8	315	226	338
13	Swedia/*Sweden*	5	3	70	134	130
14	Austria	6	13	52	117	94
15	Amerika/*USA*	13	4	366	2.049	524
16	Jepang/*Japan*	3	1	241	238	233
17	Malaysia	1	6	9	64	81
18	Arab/*Arab Countries*	3	3	19		-
19	Italia/*Italy*	12	9	121	189	228
20	Philipina/*Philippine*	-	-	40	60	62
21	Lain-lain/*Others*	4	1	76	1.237	1.045
	Jumlah/*Total*	407	383	4.460	9.129	6.645

e Sementara itu pemandangan pantai tak kalah indah dan menarik untuk dijadikan tempat istirahat dan rekreasi. Antara lain :

1 *Senggigi.*
Senggigi adalah sebuah pantai yang sangat indah dengan pasirnya yang berwarna putih bersih. Sangat ideal untuk wisata berenang karena terlindung oleh gosong-gosong karang. Lokasi ini terletak sekitar 12 Km dari kota Mataram.

2 *Gili Air, Meno dan Trawangan.*
Obyek wisata ini adalah tiga gugusan pulau kecil yang dikelilingi taman laut dengan karang-karang berwarna, ikan hias. Lokasi ini merupakan tempat yang ideal untuk berenang, snorkling, skin-diving dan lain sebagainya. Obyek wisata ini terletak sekitar 30 Km dari kota Mataram.

3 *Pantai Sire.*
Pantai Sire adalah sebuah pantai yang indah dengan pasirnya yang putih. Terlindung dalam sebuah teluk dengan airnya yang sangat jernih. Sangat cocok untuk mereka yang gemar renang dan ski air. Dari Kota Mataram jaraknya hanya sekitar 30 Km.

4 *Pantai Kuta.*
Sebuah jajaran pantai yang indah dan berpasir putih terkenal dengan nama Pantai Putri Nyale karena setiap tahun di pantai ini diadakan upacara penangkapan ikan nyale yang dikaitkan dengan legenda rakyat "Putri Mandalika". Jajaran pantai pada daerah Kuta adalah pantai Seger, Tg Bunut dan Tanjung Aan yang sangat ideal untuk surfing, wind surfing, swimming dan lain-lain. Sementara dari ibukota propinsi hanya berjarak sekitar 54 Km.

5 *Saliper Ate.*
Pantai Saliper Ate adalah pantai yang indah dan terletak hanya sekitar 5 Km dari kota Sumbawa Besar.

6 *Lawata Beach.*
Sebuah pantai indah tempat rekreasi dengan airnya yang bening terletak sekitar 2 Km dari kota Bima.

7 *Anbalawi.*
Pantai Talowai, pantai Nangwera dengan G. Wera dan pulau Sengeang, kesemuanya terletak di Kecamatan Wera. Lokasi ini

b. Narmada Garden

Narmada garden is a beuatiful royal garden, with cold, chilly athmosphere, coupled with trees and beautiful ponds. Built during the Kindom of Mataram by AA Ngurah Karangasem in 1729 Narmada garden copied the model of Rinjani peak with Segara Anak Lake in it. Narmada, derived from a name of a river in India, has a sacred temple/pura called pura Kalasa for worship of God Syiwa.

Pujawali ceremony is held onee a year at pura Kalasa for worship of Batara reigning at the mount Rinjani peak. Pujawali ceremony relates to Pakelam ceremony which functions to harbour gold-made goods into the Segara Anak lake at Mt. Rinjani.

Besides known as Royal garden, Narmada garded in also famed for its water spring which is believed to possess power to preserve youngness. It is located some 12 km from Mataram, NTB.

c. Miru Temple

Located at Cakranegera, Miru temple is built during the Kingdom of Singosari under the leadership of AA Made Kerang in 1720. Symbolising the unity of Hindu followers in Lombok, Miru temple has three parts of yard.

The first part, outside yard has a house of drum to summon Hindu followers for sacred ceremonies. The second part, inside yard has two grandsas for preparings offerings while the third yard has three Miru buildings.

The first Miru, a 11-roofed building serves a place of Sang Hayng parama Ciwa. The other miru in the south side is the 7-roofed building is the place of Sang Hyang Padra and in the north side the 9-roofed miru, the place of Sang Hyang Sada.

These three mirus have 33 eteliers for worship of Batara (Awatara).

d. Lingsar Temple

A complex of sacred puras for Hindu followers, Pura Lingsar has Hindu puras and a Kemali complex for Moslem Welu Telu sect. Once in a year, Moslem Welu Telu sect followers hold war of ketupat (rice cooked in a fist-sized container plaited of young coconut leaves). After conducting worship ceremony at Hindu puras and at Kemali complex they engaged in ketupat war of reciprocal throwing of ketupat at each other.

Helad prior to paddy planting season, the Ketupat war serves as a rain-calling ceremony hoping for wealthy harvest.

Built in 1714, Pura Lingsar is located some 10 km from Mataram, Lombok.
e. In the meantime, beach sceneries offer no less attractive place for recreation and leisure than those historical inheritances. They are :

1. Senggigi Beach.

A beautiful beach with clean and white sand, senggigi beach is located some 12 km from Mataram. It is an ideal place for swimming, surrounded by coral reef to protect swimmers from waves.

2. Gili Air, Meno and Trawangan.

A group of small islands surrounded by sea garden with colourful coral and decorated fish. An ideal place for swimming, snorkling and skin-diving. They are located some 30 km from Mataram.

3. Sire Beach

A beatiful beach with its white sand, Sire Beach is located in a bay, an ideal place for swimming and water skiing. It is located some 30 km from Mataram.

4. Kuta Beach

A long row of beautiful and white sand beaches, Pantai Kuta is also known as Putri Nyale beach for a ceremony of nyale fish catching is held onee a year and related to popular legend "Mandalike Princess". This row of beaches at Kuta includes Seger beach, Tg. Bunut beach, and Tanjung Aan beach constitute ideal place for surfing, wind surfing, swimming and others. They are located some 54 km from Mataram.

5. Saliper Ate Beach.

A beautiful beach, Saliper Ate is located 5 km from Sumbawa Besar.

6. Lawata Beach

A reacreational area, located some 2 km from the city of Bima, Lawata beach has its water transparent.

merupakan tempat yang indah terutama dengan adanya Goa Karombo di Wera sekitar 60 Km dari Kota Bima.

8 *Batu Bolong.*
Batu Bolong merupakan sebuah pantai yang indah sekali, sebab disana terdapat Pura Suci bagi umat Hindu, Batu Bolong merupakan tempat yang ideal untuk menikmati matahari tenggelam dengan latar belakang gunung agung. Terletak sekitar 9 Km dari Kota Mataram.

Di samping itu, di **Suranadi** terdapat pura Hindu yang amat suci. Di dalam kompleks pura tersebut terdapat beberapa mata air dengan ikan tuna yang sangat dikeramatkan. Pura Suranadi terletak di daerah pegunungan berhawa sejuk dengan panorama yang indah sekali. Di lokasi ini terdapat sebuah hotel yang cukup baik, di samping sebuah bangunan pura. Obyek wisata ini terletak sekitar 14 Km dari kota Mataram.

Obyek **gunung Pengsong** adalah sebuah pura suci yang terletak pada puncak bukit panorama yang sangat indah. Terdapat pula kumpulan kera-kera yang jinak dan dapat diajak bermain. Dan lokasinyapun mudah dicapai, sebab hanya berjarak sekitar 9 Km dari kota Mataram.

Cupak Gerantang adalah salah satu teater tradisional yang merupakan kekayaan budaya Pulau Lombok. Teater ini memperoleh namanya dari dua tokoh utama dalam lakon itu sendiri, yaitu Cupak dan Gerantang.

Seperti juga cerita minyet dalam Sepung, lakon Cupak Gerantang juga merupakan salah satu cabang versi Sasak dari kisah tersohor Panji Semirang. Kisah yang tergaris menampilkan pertentangan antara kejahatan melawan kebenaran telah diolah kedalam bentuk dialog yang melankolik dengan berhasil sehingga mampu menawan penonton semalam suntuk.

Genggong dari (Lombok Tengah), keunikan musik tradisional ini adalah alatnya yang sangat sederhana. Pelepah enau atau bambu yang dibentuk sedemikian rupa ternyata dapat menghasilkan paduan bunyi yang mengasikkan. Sebagai alat resonasi pemain memanfaatkan rongga mulut masing-masing.

Musik Genggong sebagai pertunjukkan dimainkan secara berkelompok. Dan sebagai hiburan sendiri dapat dimainkan seorang diri, bila anda berkunjung ke desa Barejulat di samping dapat menyaksikan kesenian Genggong dapat pula disaksikan kesenian Kamput dan tenunan tradisional di Sukarara.

Tari gandrung (Lombok Timur) merupakan tari kerakyatan, setiap penonton yang dipilih oleh penari gandrung dengan sentuhan kipasnya berhak dan berkewajiban tampil ke arena menari bersama dengan Gandrung.
Bila saatnya telah dipandang cukup namun sang penari tamu masih juga melanjutkan tariannya, maka gending tertentu segera menggema untuk mempersilahkan sang tamu meninggalkan arena. Dalam tari ini norma susila tetap dipegang teguh.

Rawambojo (Bima) merupakan gambaran kehidupan masyarakat Bima yang romantis tapi penuh semangat, diperagakan dalam sebuah bentuk seni musik. Gesekan biola dan kelincahan petikan gambus yang mengiringi alunan suara lembut nan merdu. Mempunyai pesona tersendiri yang sangat sulit untuk dilupakan. Dengan latar belakang rumah panggung yang artistik dan padang penggembalaan yang damai, irama Rawa Mbojo seperti mengikat pengunjung untuk merasa betah tinggal disana.

Istana Sultan Sumbawa, istana ini sangat megah dengan bangunan arsitek yang bericiri khas terletak di kota Sumbawa Besar, Pulau Sumbawa. **Sedang Istana Sultan Bima** yang megah terletak di dalam kota Bima, direncanakan bangunan ini nantinya akan dijadikan meseum daerah.

Dara, adalah nama sebuah desa dimana terdapat peninggalan-peninggalan dari kerajaan Bima antara lain keris "Bima Sakti" dan terletak sekitar 2 Km dari kota Bima, di P. Sumbawa.

Dari khasanah kesenian daerah Sumbawa, kita dapat menikmati musik **Sakeco.** Dendang lagu dengan iringan rebana merupakan perpaduan yang menyatu, bukan saja dengan isi syairnya, tetapi juga dengan keakraban pendudukya. Musik Sakeco selalu berperan dalam kehidupan adat masyarakat Sumbawa.

Obyek wisata lainnya yang cukup menarik adalah peninggalan dari zaman Neolit dapat disaksikan di Pulau Sumbawa antara lain di desa **Aik Bening** dan desa **Punik** yang memiliki batu berukiran gambar seorang laki-laki telanjang, seekor ayam betina dan terletak sekitar 35 Km dari Sumbawa Besar. Selain itu, lokasi lainnya yang juga cukup menarik untuk dikunjungi adalah :

Liang Petang, Pulau Moyo, Semongkat dan Lebak Taliwang. Liang Petang ialah sebuah goa yang didalamnya terdapat batu-batu menyerupai payudara wanita, terletak sekitar 25 Km dari kota Sumbawa Besar.

Pulau Moyo; bagi wisatawan yang senang dengan foto Safari, Pulau Moyo sebagai sumber marga satwa merupakan tempat yang layak karena pulau ini banyak dihuni oleh banteng liar, rusa dan jenis satwa lainnya.
Sedangkan Semongkat ialah tempat-tempat rekreasi dengan pemandangan indah di Pulau Sumbawa, berhawa penuh keasrian alam dan terletak sekitar 17 Km dari kota Sumbawa Besar.
Lebok Taliwang adalah sebuah danau yang indah dan menawan pemandangannya, di atasnya terdapat dataran tinggi Donggo di Ooe dan kolam renang Maria di Kecamatan Wawo yang terkenal dengan vokalgroupnya hanya berjarak sekitar 17 Km dari kota Bima.

7. Ambalawi

Talowai beach, Naguwera beach, Mount Wera and Aangeang island are all located at Wera sub-district. Beautiful place particularly its Karombo cave located some 60 km from the city of Bima.

8. Batu Bolong.

A very beautiful beach, Batu Bolong has a holy pura for Hindus Located some 9 km from the city of Mataram, Batu Bolong is an ideal place to enjoy sunset with Mount Agung in the background. It is located some 9 km the city of Mataram.

In addition to that, Suranadi has a holy Pura for Hindus. The complex has water springs and sacred tuna fish. Located in a cool mountainous area, Suranadi Pura now has a wellfurnished hotel next to the pura. It is located 14 km from Mataram.

Mount Pengsong Pura is holy pura located on top of Mount Pengsong. Possessing tamed apes. It is accessible. Just 9 km from Mataram.

Cupak Grantang is one of Lombok island's traditional theatre. Its name derives from the characters of the play, Cupak and Gerantang. Similar to ape play of Sepung, Cupak Gerantang play is one of Sasak versions of well-knowns Panji Semirang story.

The story tells about a conflict between truth and sin, transfered into melancholic dialogues so beatifully directed to captivate viewers attention for whole night.

Music Genggong, its unique rests with its simplicity os its instrument which made of bambo or handbreadth of palm tree in such a form to produce attractive sound. The players using their own oral cavity to produce resonance. Originated in central Lombok, Music Genggong is played in group for show to public or in solo for entertainment. Music Genggong is also found at Barejulat village which has also Kamput play, while traditional weaving found at Sukarana.

Gandrung Dance. A folk dance from East Lombok and viewers of it should join the dance whenever Gandrung dancer summons them to join. Ethical norms are highly respected.

Rawambojo from Bima reflects the romantic and highly spirited life of Bima people. Performed in musical form of violin and the Arabian 6-stringed lute Rawambojo possesses a special and unforgettable enhanctment, able to bind its listeners to feel at home.

Sumbawa Sultanate Palace

This glorious Royal Palace with its special architectures located in Sumbawa Besar, Sumbawa island. Bima Sultanate Palace located in the town of Bima is scheduled to be converted into a museum.

Dara a village possessing a rich variety of enhiritance of Bima Kingdom such as Sacred Bima Keris/creese, located some 2 km from Bima in Sumbawa island.

Other Sumbawa's art treasury isakeco music, a combination of song and tambourine very intimate to local people. Sakeco music always plays a special role in Sumbawa people custom.

Other attractive tourist objects are an enheritance of Neolit age such a naked man and a hen at the village of Aek Bening and Punik in Sumbawa island, some 35 km from Sumbawa Besar.

Other interesting places to visit include : Liang Petang, Moyo island, Semongkat and Lebak Taliwang, Located some 25 km from Sumbawa Besar, Liang Petang is a cave which has stones resembling women breast.

Moyo island a site of wild animals such as wild buffalos, deers and many others. An ideal place photography-seeking tourists. Semongkat located some 17 from Sumbawa Besar at Sumbawa island is a recreational place with beuatiful scenery and cool air.

Lebak Taliwang located some 17 km from Bima is a beautiful lake with Donggo plateau next to it and Maria swimming pool at Wawo sub-district.

B A B / *CHAPTER IV*

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
SOCIAL DEVELOPMENT

1. Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PEMBANGUNAN di bidang agama lebih diarahkan untuk meningkatkan usaha-usaha pembangunan di bidang agama dan mengintegrasikannya dengan pembangunan bidang lainnya. Oleh karena itu pembangunan di bidang agama dilaksanakan melalui program-program yang berupa peningkatan sarana kehidupan beragama, penerangan dan bimbingan hidup keagamaan, peningkatan pelayanan bagi pembinaan pendidikan agama mulai dari tingkat pendidikan Dasar, Pendidikan menengah dan sampai kepada pendidikan agama pada tingkat pendidikan tinggi.

Dalam tahun 1978 telah diberi bantuan sebanyak 119 buah tempat ibadah dan sampai tahun 1982/1983 telah meningkat menjadi 1.143 buah tempat ibadah. (Lihat Tabel NTB IV - 1).

Sementara itu pengadaan kitab suci dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kitab suci disamping merangsang dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam usaha mengembangkan methode dan penafsiran kitab suci yang dapat memudahkan penganut agama yang bersangkutan mempelajari agama masing-masing.

Pada tahun 1978 telah diusahakan penyediaan dan penyebaran kitab suci sebanyak 1.949 buah yang terdiri dari kitab suci Al-Qur'an 971 buah, kitab Wedha sebanyak 978 buah. Penyediaan kitab suci tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan 1982/1983 telah meningkat menjadi 11.635 buah, yang terdiri dari kitab suci Al Qur'an 2.622 buah, Injil Protestan Katholik 4.105 buah dan kitab suci agama Hindu dan Budha sebanyak 4.908 buah.

Sejauh yang menyangkut perangkat lunak, penerangan dan penyuluhan agama ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada Narapidana, Tuna susila dan sebagainya. Pada tahun 1978 telah diadakan/diberikan bimbingan agama kepada 1.740 kelompok masyarakat. Di samping itu telah diterbitkan buku brosur agama 11.340 eksemplar dan dakwah 425 buah. Pada tahun 1982/1983, telah dapat dijangkau 25.608 kelompok masyarakat. Sedangkan penyediaan brosur agama jumlahnya meningkat menjadi 51.515 eksemplar dan paket dakwah sebanyak 1.025 set/buah. Khusus untuk agama Islam, Musyabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) telah semakin melembaga di tengah-tengah masyarakat yang penyelenggaraannya mulai dari tingkat Desa dan Kecamatan.

Pembinaan pemuka Agama dan Alim Ulama diarahkan pada peningkatan kerukunan hidup beragama, yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama.

- Kerukunan Intern Umat Beragama.
- Kerukunan Antar Umat Beragama.
- Kerukunan Antar Umat Beragama dengan pemerintah.

Usaha-usaha yang diambil adalah dengan mengadakan pertemuan-pertemuan, musyawarah-musyawarah, penataran-penataran, Pekan Komunikasi dan Studi Perbandingan bagi pemuka agama alim ulama.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan Haji telah disempurnakan Fasilitas dan pelayanan ibadah haji. Usaha yang telah dilaksanakan antara lain, Pembangunan Terminal Haji yang lengkap, dengan tempat peribadatannya (Musalla). Di samping itu pula telah disempurnakan prosedur administrasi ibadah haji dan peningkatan ketrampilan para petugas, sehingga mampu melayani jemaah haji secara lebih baik.

2. Pendidikan, Pembinaan Generasi Muda, dan Kebudayaan

Pembangunan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila ditujukan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan dan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. Pembinaan Generasi Muda diarahkan untuk mempersiapkan kader bangsa penerus perjuangan dan pembangunan nasional dengan memberi bekal ketrampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, patriotisme, kepribadian dan budi pekerti.

a. Pendidikan Dasar

Pembinaan pendidikan dasar bertujuan untuk meningkatkan daya

1. Religion and Belief in Almighty God.

THE DEVELOPMENT of religion is directed to increase efforts of religious development and to integrate it into development of other fields. The development of religion is executed through programmes to increase the facilities religious life, information and guidance of religious life, service of religious education starting from basic education, secondary education up to religious education at High Learning Institution.

In 1978, aid was given to 119 units of houses of worship and in 1982/1983 it increased to cover 1.143 units. Meanwhile the provision of holy books is intended to help the community in fulfilling the need for holy books besides the stimulation and guidance of the community in the effort of developing the method to interprete the holy books which will enhance the religious believers to learn their respective religious. See Table IV – 1.

In 1978 provision and distribution of holy books numbered 1,949 units consisting of holy Al Qur'an 971 untis and holy Vedha 978 units. The provision of holy books since 1978 up to 1982/1983 increased to 11,635 units, consisiting of holy Al Qur'an 2,622 units, Bibles of Protestant and Catholics 4, 105 units, and holy books of Hindu and Budha 4,908 units.

As regard soft-ware promotion, information and consultation of religion is directed to the community in general to prisoners, prostitutes and the likes in particular. In 1978 religious guidance had been executed to 1,740 comminity groups. Besides that 11, 340 copies of religious brochures and 425 units of religious information had been published. In 1982/1983, 25,608 community groups could be covered, while the provision of religious brochures increased to 51,515 copies and religious information parcels became 1,025 units. Especially for Islam, MTQ (Musyabaqah Tilawatil Qur'an= Al Qur'an Recital Contest) had been well instituted among the community and the implemantation was started from village and sub District levels.

The promotion of Religious leaders and Alim Ulama (Islamic Religious Experts) is directed to enhance harmony among Religious believers :

- *Harmony of Internal Religious believers.*
- *Harmony of Inter Religious believers.*
- *Harmony of Inter Religious believers and the government.*

The efforts execute in this regard included meetings, consultation, upgradings, Communication Week. and Comparative study for Religious figures and Alim Ulama.

To promote the service of Pilgrimage, facilities and services have been improved. Efforts were executed such as Complete Pilgrimage Terminal Development, provided with small mosque. Besides, administrative procedures of pilgrimage and increase of vocational skill of officials had been improved, so that they could serve better the pilgrimage groups. See Table IV – 2.

2. Education. Promotion of Younger Generation and Culture.

Development of national education is based on Pancasila (Five Principles) to promote belief in Almighty God, intellectual, morality, personality and nationalism. The promotion of the younger generation is directed to prepare national cadres to continue the struggle and national development by providing them with vocational skills, leadership, health, patriotism, personality and morality.

a. Basic Education

The promotion of basic education is directed to increase the capacity of accomodation and quality of Primary Schools, Kindergartens and Schools for Retarded Children. Every year the capacity of accomodation of basic education increased by 11 %, because since 1979/1980 up to 1983/1984 building of Primary School had been established and increased by 2,454 units ; Kindergartens increased by 307 units.

The number of teachers of general basic education increased by 3310 persons, Teachers of Kindergarten and Teachers of School for Retarded Children respective by numbered 299 persons and 7 persons.

To increase quality of education since 1979 up to 1982/1983 text books of Primary School numbered 1,627,790 copies had been distributed. consisiting of books of Bahasa Indonesia, mathematics, IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial = Social Sciences) and IPA (Ilmu Pengetahuan Alam = Natural Sciences).

The number of primary schools were foloows :

- *In 1978 there were 1,756 units and in 1982/1983 became 2,353 units*

tampung dan mutu Sekolah Dasar, Taman kanak-kanak dan Sekolah Luar Biasa. Tiap tahun daya tampung pendidikan dasar meningkat: 11%, yang disebabkan sejak tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1983/1984 telah dibangun gedung-gedung sekolah Dasar hingga bertambah sebanyak 2.454 unit; Taman kanak-kanak bertambah sebanyak 307 buah.

Tabel / *Table IV - 1*

BANYAKNYA TEMPAT IBADAH DIPERINCI MENURUT KABUPATEN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979/1980 - 1984/1985

NUMBER OF HOUSES OF WORSHIP BY DISTRICT IN WEST NUSA TENGGARA REGION 1979/1980 — 1984/1985

KABUPATEN *DISTRICT*	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85
1	2	3	4	5	6	7
Lombok Barat :	**1.829**	**1.924**	**1.932**	**2.048**	**2.023**	**2.028**
- Masjid/*Mosques*	745	750	750	752	781	787
- Musollah/*Smale Mosques*	437	343	333	353	353	378
- Langgar/*Village Mosque*	437	624	628	666	651	
- Gereja/*Churches*	11	8	11	11	7	14
- Pura/*Vihara*	199	199	214	304	216	198
LOMBOK TENGAH: ***West Nusa Tenggara***	**3.279**	**2.681**	**2.686**	**2.697**	**2.267**	**2.332**
- Masjid/*Mosques*	873	903	903	914	947	963
- Musollah/*Smale Mosques*	1.188	496	496	496	694	497
- Langgar/*Village Mosques*	1.205	1.270	1.270	.270	6101	863
- Gereja/*Churches*	4	3	4	4	3	-
- Pura/Vihara	9	9	13	13	13	9
LOMBOK TIMUR : ***East Lombok***	**3.633**	**3.154**	**3.275**	**3.274**	**3.118**	**3.397**
- Masjid/*Mosques*	724	749	778	778	780	838
- Musollah/*Smale Mosques*	1.453	950	788	788	798	781
- Langgar/*Village Mosques*	1.453	1.453	1.706	.7061	1.5381	.776
- Gereja/*Churches*	2	1	2	1	1	1
- Pura/Vihara	1	1	1	1	1	1
SUMBAWA :	**498**	**443**	**455**	**460**	**463**	**475**
- Masjid/*Mosques*	357	358	363	378	387	390
- Musollah/*Smale Mosques*	62	8	11	13	7	9
- Langgar/*Village Mosques*	61	62	63	49	50	57
- Gereja/*Churches*	8	5	8	8	6	6
- Pura/*Vihara*	10	10	10	12	13	13
DOMPU :	**161**	**136**	**138**	**139**	**138**	**163**
- Masjid/*Mosques*	100	108	108	111	126	
- Musollah/*Smale Mosques*	28	7	7	7	8	15
- Langgar/*Village Mosques*	28	17	17	17	15	17
- Gereja/*Churches*	3	2	4	5	2	2
- Pura/*Vihara*	2	2	2	2	2	2
BIMA :	**503**	**419**	**422**	**443**	**477**	**479**
- Masjid/*Mosques*	304	305	305	316	324	324
- Musollah/*Smale Mosques*	94	11	11	20	21	21
- Langgar/*Village Mosques*	94	95	95	96	125	125
- Gereja/*Churches*	8	5	5	9	5	7
- Pura/*Vihara*	3	3	2	2	2	2
NTB :	**9.903**	**8.757**	**8.908**	**9.061**	**8.486**	**8.869**
- Masjid/*Mosques*	3.103	3.173	3.207	3.061	3.330	3.428
- Musollah/*Smale Mosques*	3.262	1.815	1.646	1.677	2.194	1.696
- Langgar/*Village Mosques*	3.273	3.527	3.775	3.766	2.691	3.489
- Gereja/*Churches*	36	24	33	38	24	30
- Pura/*Vihara*	224	224	242	334	247	226

Jumlah Guru Pendidikan Dasar Umum bertambah sejumlah 3310 orang, Guru Taman Kanak-kanak dan Guru Sekolah Luar Biasa masing-masing sebanyak 299 orang dan 7 orang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1982/1983 telah disebar buku-buku pelajaran sekolah Dasar sebanyak 1.627.790 eksemplar, terdiri dari buku bahasa Indonesia, matematika, IPS dan buku IPA.

Jumlah Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :

- Tahun 1978 sejumlah 1.756 buah dan tahun 1982/1983 sebanyak 2.353 buah dengan perincian Sekolah Dasar Inpres 1.036 buah dan Sekolah Dasar non Inpres 1.396 buah.
- Tahun 1978, Taman Kanak-kanak Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa masing-masing berjumlah 64 buah, 361 buah dan 1 buah, sedangkan tahun 1983 masing-masing telah menjadi 307 buah, 355 buah dan 2 buah.

consisting of Inpres Primary Schools (Instruksi Presiden = Instruction of the President) numbered 1,036 units and Non Inpres Primary Schools numbered 1,396 units.

– In 1978, Kindergarten, MI (Madrasah Ibtidaiyah = Islamic Primary School) and school for Retarded Children respectively numbered 64 units, 361 units and 1 unit, while in 1983 respectively became 307 units, 355 units, and 2 units.

The number of teachers were as follows :

- *Primary School teachers .... 13,822 persons.*
- *MI teachers .... 355 persons.*
- *Kindergarten teachers .... 480 persons.*
- *Schools for Retarded Children .... 8 persons.*

Meanwile, the number of pupils up to 1982/1983 were as follows :

- *Primary School pupils .... 476,765 persons.*
- *MI pupils .... 44,530 persons.*
- *Kindergarten pupils .... 11,288 persons.*
- *Schools for Retarde Children .... 50 persons.*

Tabel / *Table IV - 2*

BANYAKNYA JEMAAH HAJI DI PERINCI MENURUT KABUPATEN DI DAERAH NTB TAHUN 1979/1980 s/d 1984/1985

NUMBER OF PILGRIMS BY DISTRICT IN WEST NUSA TENGGARA REGION 1979/1980 — 1984/1985

Kabupaten *District*	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85
LOMBOK BARAT : ***WEST LOMBOK***	**249**	**485**	**485**	**211**	**301**	**130**
- Lelaki/*Male*	197	-	334	113	200	76
- Perempuan/*Female*	52	-	151	98	101	54
LOMBOK TENGAH :	**220**	**651**	**651**	**73**	**370**	**68**
- Lelaki/*Male*	180	-	524	57	269	53
- Perempuan/*Female*	40	-	127	16	101	15
LOMBOK TIMUR :	**355**	**528**	**538**	**215**	**415**	**163**
- Lelaki/*Male*	292	-	408	62	295	107
- Perempuan/*Female*	63	-	130	215	120	56
SUMBAWA :	**183**	**231**	**231**	**78**	**225**	**134**
- Lelaki/*Male*	139	-	181	55	161	94
- Perempuan/*Female*	44	-	50	23	64	40
DOMPU :	**32**	**106**	**108**	**42**	**100**	**40**
- Lelaki/*Male*	18	-	85	24	77	28
- Perempuan/*Female*	14	-	23	18	23	12
BIMA :	**347**	**734**	**734**	**238**	**847**	**315**
- Lelaki/*Male*	283	-	528	149	599	222
- Perempuan/*Female*	64	-	206	89	248	93
TPHI :	-	-	**13**	**10**	**16**	**10**
- Lelaki/*Male*	-	-	13	10	16	10
- Perempuan/*Female*	-	-	5	1	3	3
NTB :	**1.386**	**2.747**	**2.761**	**862.**	**274**	**860**
- Lelaki/*Male*	1.109	-	2.069	5601	.614	587
- Perempuan/*Female*	277	-	692	307	660	273

Sumber : KTR Gubernur KDH TK I NTB (Urusan Haji Prop NTB)
Source : Governor's Office, West Nusa Tenggara Province (Pilgrimage Affairs of West Nusa Tenggara Province).

b. SMTP (Sekolah Menengah Tingkat Pertama = Junior High School)

The promotion is directed to increase the capacity of accomodation, mainly of SMP (Junior High School) and Vocational Junior School. In 1978/1979 the number of SMTP in West Nusa Tenggara were 112 units with 578 classrooms. During the period of 1979/1980 – 1982/1983 25 buildings of SMTP consisiting of 159 classrooms had been established, while 26 old buildings had been rehabilitated. Besides, 180 additional classrooms had been built.

To enhance the process of Learning-and-teaching, 620 teachers of SMTP had been appointed during the last four years of Repelita III, or an increase by 313 % when compared with that of 1978/1979. In the framework of increasing voca-

Jumlah Guru adalah sebagai berikut :

- Guru Sekolah Dasar .... 13.832 orang
- Guru Madrasah Ibtidaiyah .... 355 orang
- Guru Taman Kanak-kanak .... 480 orang
- Guru Sekolah Luar Biasa .... 8 orang

Sedangkan jumlah murid sampai dengan tahun 1982/1983 adalah sebagai berikut :

- Murid Sekolah Dasar .... 476.765 orang
- Murid Madrasah Ibtidaiyah .... 44.530 orang
- Murid Taman Kanak-kanak .... 11.288 orang
- Murid Sekolah Luar Biasa .... 50 orang

b. Pendidikan Menengah Tingkat Pertama (SMTP)

Tujuan Pembinaan adalah meningkatkan daya tampung, terutama pada SMP dan SMTP kejuruan. Pada tahun 1978/1979 jumlah SMTP di Nusa Tenggara Barat 113 buah dengan ruang kelas sejumlah 578 buah. Dalam periode 1979/1980 - 1982/1983 telah dibangun gedung SMTP sebanyak 25 buah yang terdiri dari 159 ruang kelas. Sementara itu gedung-gedung SMTP yang mengalami kerusakan telah pula direhabilitasi 26 buah sekolah yang terdiri dari 26 ruang kelas. Di samping itu telah dibangun tambahan ruang kelas sejumlah 180 ruangan.

Untuk menunjang proses belajar-mengajar maka telah diangkat 620 orang guru SMTP selama 4 tahun terakhir Repelita III, atau bertambah 313% dibanding tahun 1978/1979. Dalam rangka meningkatkan keterampilan murid-murid SMTP, telah dibangun 22 buah laboratorium, 11 ruang keterampilan dan dilengkapi dengan peralatan laboratorium dan 42 unit peraga Matematika. Jumlah tenaga Guru (negeri dan Swasta) pada tahun 1978 adalah 1.790 orang, dan pada tahun 1982/1983 meningkat menjadi 3.555 orang.

c. Pendidikan Menengah Tingkat Atas (SMTA).

Jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah atas pada tahun 1982/1983 sebanyak 251.065 orang. Jumlah penduduk tersebut merupakan sarana pendidikan menengah atas. Tahun 1978, jumlah SMTA sebanyak 61 buah, pada tahun 1982/1983 bertambah sebanyak 28 buah. Tahun 1978, jumlah murid yang dapat ditampung 18.397 orang murid sedangkan tahun 1982/1983 jumlahnya meningkat menjadi 35.421 orang murid. Jumlah tenaga Guru tahun 1978 adalah 1.249 orang dan pada tahun 1982/1983 meningkat menjadi 2.300 orang guru. (Lihat Tabel IV - 3).

d. Pendidikan Tinggi.

Perkembangan Pendidikan Tingga Nusa Tenggara Barat cukup menggembirakan. Sampai saat ini jumlah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Nusa Tenggara Barat sebanyak 13 buah yang terdiri dari 3 Perguruan Tinggi Negeri dan 10 buah Perguruan Tinggi Swasta.

3. Pembinaan Generasi Muda.

Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda diarahkan pada kader kepemimpinan, keterampilan dan daya kreasi. Pengembangan hal tersebut di atas dilakukan dengan pemberian latihan-latihan dalam bentuk latihan Perintis Pemuda, Pemuka Pemuda, pendamping pemuda serta penataran pemuda. Untuk meningkatkan keterampilan diadakan kegiatan pertukaran pemuda antar Propinsi, pembinaan Paskibraka, penyelenggaraan Festival Pemuda dan sebagainya. Untuk itu kepada KNPI telah diberikan bantuan prasarana gedung dan kendaraan roda empat dan roda dua. Demikian pula kepada Pramuka telah diberikan bantuan sehingga dapat mengikuti Jambore Nasional dan penyelenggaraan Jambore Nasional.

K e b u d a y a a n

Peninggalan sejarah dan purbakala yang telah dipugar meliputi Makam Selaparang, Tanjung, Masjid Pujut, Rambitan, Taman Narmada dan Istana Bima. Selain itu telah dilakukan pula kegiatan inventarisasi peninggalar sejarah dan benda-benda purbakala pada 6 Kabupaten. Untuk meningkatkan dan memelihara warisan budaya telah dibangun museum. Sedangkan pengembangan kesenian diarahkan kepada penyelamatan karya seni dan pembibitan kader kesenian bagi masyarakat. Dalam hubungan ini masing-masing kabupaten telah diberikan bantuan paket peralatan kesenian sebagai sarana penunjang kegiatan kesenian.

4. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan lebih banyak ditujukan ke arah peningkatan/penyempurnaan dari apa yang telah dibangun sebelumnya. Dengan demikian bertambahnya sarana dan prasarana, kegiatan yang sifatnya operasional dapat dilaksanakan lebih intensif dengan jangkauan

tional skills of SMTP students, 22 units of laboratories, 11 vocational skill room had been established and provided with laboratory equipments and 42 demonstration units of mathematics had also been established. The number of teachers (public and private) in 1978 were 1,790 persons and in 1982/1983 became 3, 555 persons.

c. SMTA (Sekolah Menengah Tingkat Atas = Senior High School)

Number of SMTA age-group population in 1982/1983 were 251,065 persons. In 1978 SMTA schools numbered 61 units, in 1982/1983 increased by 28 units. In 1978 the number of students which could be accomodated were 18,597 persons while in 1982/1983 became 35,421 persons. In 1978 the number of teachers were 1,249 persons and in 1982/1983 increased to 2,300 persons. *See Table IV–3.*

Tabel / *Table IV - 3*
BANYAKNYA SEKOLAH, MURID DAN GURU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA, DAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DI DAERAH NTB
TAHUN 1981/1982 - 1984/1985
NUMBER OF SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS OF KINDERGARTEN, PRIMARY SCHOOLS, SMTP, SMTA IN WEST NUSA TENGGARA, 1981/1982 - 1984/1985

JENIS SEKOLAH *TYPES OF SCHOOLS*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984	1984/1985
1	2	3	4	5	6	7
TK/*Kindergarten*						
Sekolah/*School*	-	-	248	287	307	331
Murid/*Pupil*	-	-	11.701	18.288	11.613	13.172
Guru/*Teachers*	-	-	440	480	516	563
SEKOLAH DASAR *SENIOR HIGH SCHOOL*						
Sekolah/*School*	1.818	1.975	2.075	2.206	2.454	2.672
Murid/*Pupil*	344.763	395.706	431.226	476.765	521.025	556.326
Guru/*Teachers*	12.182	12.174	12.787	13.832	15.931	17.468
SMTP/*PRIMARY SCHOOL*						
Sekolah/*School*	130	147	163	185	197	232
Murid/*Pupil*	39.783	48.460	56.273	69.507	78.899	86.211
Guru/*Teacher*		2.153	2.529	2.944	4.402	4.118
SMTA/*JUNIOR HIGH SCHOOL*						
Sekolah/*School*	66	80	85	88	112	116
Murid/*Pupil*	20.840	26.802	31.430	35.421	42.877	46.954
Guru/*Teacher*	1.416	1.669	2.005	2.300	2.736	3.013

d. Higher Learning

The growth of Higher Learning in West Nusa Tenggara is reasonably encouraging. Presentrly the number of Public / Private Higher Learning Institutions are 13 units, consisiting of 3 units of Public Higher Learnings, and 10 units of Private Higher Learnings.

3. Promotion of the Younger Generation

Promotion and development of the Younger Generation is directed to cultivate cadres of Leadership, vocational skills and creativity. The development of aspects mentioned above are carried out through trainings in the form of Youth pioneer-training, Youth figures, Youth Guides and upgrading of youth. To promote vocational skills there are inter Provincial youth exchange, promotion of Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka = Hoisting Team of Sacred Banner), execution of youth festivals and miscellany. For those perposes buildings and four-wheel and Two-wheel vehicles had been given to the KNPI (Komite Nasional Pemudah Indonesia = National Committee of Indonesia Youth). Aid for scouts had been given so that they could participate in the National Jamboree and the execution of National Jamboree.

Culture

Historical inheritance and archaelogical remains which had been restored covering Selaparang and Tanjung Graves, Pujut and Rambitan Mosques, Narmada Park and Bima Palace. Besides, efforts of inventory of historical inheritances and archaelogical objects had been executed in 6 Districts. A meseum had been bilt to increase and to take care of the cultural inheritances. Meanwhile,

yang luas dan target pencapaian yang lebih luas. (Lihat Tabel IV - 4).

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan BKIA.

Kecamatan dengan penduduk lebih dari 300.000 orang atau Kecamatan yang wilayahnya cukup luas ditambah dengan Puskesmas baru, peningkatan BP dan BKIA menjadi Puskesmas Pembantu, disamping pelayanan Puskesmas Pembantu sehingga tercapai ratio 1 Puskesmas dengan 2 - 3 buah Puskesmas pembantu. Untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir dan cukup strategis ditempuh kebijaksanaan.

- Menyediakan Puskesmas keliling kendaraan roda 4 dan perahu motor.
- Membangun ruang untuk rawat tinggal dengan kapasitas 10 tempat tidur dengan dasar pertimbangan letak yang strategis, terisolir, dapat melayani beberapa Kecamatan yang angka kunjungannya tinggi.

Tabel / *Table IV - 4*

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN PADA POLIKLINIK RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979/1980 - 1984/1985

VISITS TO PUBLIC HOSPITALS IN WEST NUSA TENGGARA. 1979/1980 - 1984/1985.

Nama Rumah Sakit *Name of Hospital*	Jumlah kunjungan per-tahun/*Number of visits per year* 1979/80 *1979/80*	1980/81 *1980/81*	1981/82 *1981/82*	1982/83 *1982/83*	1983/84 *1983/84*	1984/85 *1984/85*
1 RSU Mataram *Public Hospital Mataram*	48.659	60.572	47.658	66.321	50.713	66.031
2 RSU Praya *Public Hospital Praya*	23.100	33.086	26.923	33.228	17.246	30.468
3 RSU Selong Public Hospital Selong	31.813	39.804	21.490	42.006	44.493	49.854
4 RSU Sumbawa *Public Hospital Sumbawa*	23.258.	32.435	17.173	41.923	39.934	34.206
5 RSU Dompu *Public Hospital Dompu*	17.601	17.839	15.041	16.792	13.083	15.152
6 RSU Bima *Public Hospital Bima*	.15.497	25.827	12.596	30.738	23.401	36.502
Jumlah/*Total*	159.928	209.563	140.881	231.008	188.930	232.213

Penambahan tenaga diusahakan sangat besar jumlahnya, walaupun masih kurang dari jumlah yang dibutuhkan.
Penambahan tenaga tersebut sebagian besar melalui pengangkatan formasi Inpres bantuan Sarana Kesehatan, Peningkatan jumlah pegawai, tenaga medis, dan para medis. (Lihat Tabel IV - 5 dan Tabel IV - 6).

Tabel / *Table IV - 5*

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN PADA PUSKESMAS PER-KABUPATEN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979/1980 - 1984/1985
VISITS TO PUBLIC HEALTH CENTRES BY DISTRICT IN WEST NUSA TENGGARA, 1979/1980 - 1984/1985

No	Kabupaten *District*	Jumlah kunjungan per-tahun/*Number of visits per year* 1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1	Lombok Barat/*West Lombok*	479.109	504.072	494.596	516.083	477.921
2	Lombok Tengah *Lombok*	406.191	482.931	459.256	516.082	312.502
3	Lombok Timur *East Lombok*	227.702	254.736	253.688	254.041	221.890
4	Sumbawa	200.449	227.661	202.475	220.360	196.292
5	Dompu	65.449	83.114	148.822	90.243	79.529
6	Bima	219.889	273.276	252.280	334.220	218.102
	Jumlah/*Total*	1.598.789	1.825.790	1.811.417	1.931.029	1.506.236
	Jumlah Puskesmas *Number of Public Health Centres*	68	72	75	80	85
	Puskesmas Pembantu *Auxiliary Public Health Centres*	82	119	174	204	229
	Puskesmas Keliling *Mobile Public Health Centres*	17	19	32	39	45

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Satelitnya.

Disamping peningkatan jumlah Puskesmas dan Puskesmas pembantunya, BP dan BAIK secara bertahap terus ditingkatkan fungsinya menjadi Puskesmas pembantu. Kunjungan pada Puskesmas meningkat dari rata-rata 42 penderita per hari, pada awal Pelita III menjadi 65 orang

the development of art is directed to safeguard art-products and to form art-cadres in the community. In relation to the matter art-equipment parcels had been given to respective districts as supporting factors of art activities.

4. Health

Health development is mainly directed to the increase/completion of what had been develop before. Thus the increase of facilities and infrastructures and operational activities can be more intensively executed to cover wider target of achievement. See Table IV–4.

Public Health Centre, Auxiliary Public Health Centre, Clinic and BKIA (Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak = Mother and Infants Welfare Clinics)

A sub District with population more than 300,000 persons or sub district with large area is provided with one additional new Public Health Centre. Besides, clinics and BKIA are promoted to become Auxiliary Public Health Centres so that the ratio between the number of Public Health Centres and Auxiliary Public Health Centre is 1:2 or 1:3.

To reach remote and strategic areas, the following policies are executed :

- *To provide 4-wheel vehicles and motor-boat as mobile Public Health Centre.*
- *To build rooms for hospitalization with capacity of 10 beds with a view to serve a number of sub districts with high frequency of visits.*

The addition of officials is attempted in a large number although it is still inadequate. The additional is mostly effected through recruitment by Inpres aid for Health Facilities. See Tables IV–5 and IV–6.

Tabel / *Table IV - 6*

BANYAKNYA TENAGA KESEHATAN DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, TAHUN 1979-1984

NUMBER OF MEDICS AND PARAMEDICS IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE, 1974 - 1984

No	Jenis Tenaga Types of Officials	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1	Dokter Spesialis *Specialist*	5	5	6	6	6	9
2	Dokter Umum *Physician*	105	100	111	127	127	154
3	Dokter Gigi *Dentist*	12	17	13	13	13	23
4	Sarjana Kes Masyarakat *Graduate of Public Health*	4	2	2	3	3	11
5	Apoteker *Pharmacist*	7	9	10	8	8	17
	Para Medis/*Paramedics*						
	- Sarjana *University Graduate*	.	.	.	.	.	.
	- Sarjana Muda *Bachelor*	4	31	38	27	27	46
	- SLTA *Senior High School*	103	298	457	451	451	1 255
	- SD/SLTP *Primary School/Junior High School*	198	291	517	550	550	.
7	Tata Usaha	1.318	575*	867	506	506	1.049
	Jumlah/*Total*	1.758	1.328	2.021	1.091	1.691	2.564

Increase of Health Services in Public Health Centre and its auxiliary.

Besides the increase of Public Health Centres and Auxiliary Public Health Centre, the function of Clinics and the BKIA is continually promoted to become auxiliary Public Health Centres. Visits to Public Health Centres increased from an average of 42 patients per day at the begining of Pelita III to 65 persons per day, exceeding the national target of Pelita III, namely an average of 50 persons per day.

UKP (Usaha Kesehatan Pokok = Effort of Basic Health) also increased. For instance, at the beginning of Pelita III a Public Health Centre averagely executed 6 to 7 UKPs, but at present it increases to 8 to 12 UKPs. The coverage of Public Health Centre and its auxiliaries also increased, from 27.14 % became 44.20 %. The function of Public Health Centre as a Rehydration centre had decreased the rate of mortality caused by Muntaber (Muntah beak = vomit and diarrhea/cholera) to less than 2%. Likewise, the rate of illness'and the rate of mortality have the general tendency to decrease.

Promotion of Public Health.

The efforts for the promotion of Public Health cover :

- *Instructions on Public Health.*

per hari, berarti telah melebihi target Nasional Pelita III yaitu 50 orang kunjungan rata-rata per hari.
Usaha Kesehatan Pokok (UKP) yang dilaksanakan juga meningkat. Sebagai contoh, pada awal Pelita III rata-rata Puskesmas melaksanakan 6 sampai 7 UKP, tapi saat ini rata-rata melaksanakan 8 sampai 12 UKP. Liputan (Coverage) dari Puskesmas dan Satelitnya juga meningkat, dari 27,14% menjadi 44,20%. Berfungsinya Puskesmas sebagai Rehydrasi Centre telah dapat menurunkan angka kematian dari penyakit Muntaber di lapangan menjadi di bawah 2%. Begitu pula halnya dengan angka kesakitan dan angka kematian cenderung menurun.

Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Usaha pembinaan Kesehatan Masyarakat meliputi kegiatan :
- Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Usaha Kesehatan Gizi Sekolah (UKGS).
- Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB).

Penyuluhan kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, sikap dan tingkah laku masyarakat ke arah kehidupan yang sehat. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yang ada serta menambah pengetahuan dan ketrampilan guna dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi dengan jalan peningkatan komunikasi dan penyebarluasan informasi kesehatan.

Prioritas program yang dilaksanakan adalah kesehatan lingkungan, peningkatan Gizi, KB/Kependudukan, Immunisasi terhadap anak Balita, peningkatan dan pembinaan partisipasi swasembada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, diperoleh dana melalui pusat maupun daerah yang setiap tahunnya terus meningkat. Dana tersebut di atas dipergunakan untuk kegiatan penyuluhan dalam bentuk pendekatan massa, kampanye kesehatan, pengadaan media komunikasi, ceramah, diskusi, demontstrasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Usaha Kesehatan Sekolah meliputi pendidikan kesehatan, mencipta lingkungan sekolah yang sehat dan pelayanan kesehatan disekolah dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan anak sekolah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
- Penemuan kelainan secara dini dan pengobatan sementara yang dilakukan oleh guru sekolah yang telah mendapat pendidikan dan latihan UKS.
- Penemuan anak luar biasa diantara anak-anak sekolah di beberapa daerah yang dicakup oleh UKS.

Sampai saat ini UKS telah menjangkau 956 SD dan 129 Madrasah 21 SLTP dan jumlah guru yang telah di tatar UKS adalah sebagai berikut : Guru SDN sabanyak 2.479 orang, Madrasah 129 orang, SLTP 420 orang dan SLTA 309 orang. Disamping itu juga telah dilakukan perlindungan/pencegahan penyakit gigi terhadap murid-murid sekolah Dasar melalui UKGS yang sampai sekarang jumlah murid yang diperiksa sebanyak 7.513 orang murid lama dan 5.814 murid baru.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Ibu dan Anak antara lain :
- Penimbangan berkala bayi dan anak Balita
- Pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang menderita kekurangan gizi.
- Perawatan Kesehatan Keluarga.
- Penyuluhan Gizi dalam bentuk demonstrasi gizi.
- Kursus Bidan Bersalin.

Sampai saat ini telah dikursus 1.685 orang dukun dari 3.306 dukun yang ada dan dukun yang telah mengikuti kursus tersebut diberikan DUKUN KIT.

5. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penduduk

Jumlah penduduk di daerah Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil sensus tahun 1971 tercatat sebanyak 2,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat pencari kerja/penganggur sebanyak 27.565 orang, atau 3,88% dari jumlah angkatan kerja.
Sedangkan berdasarkan hasil sensus tahun 1980 jumlah penduduk sebanyak 2,7 juta. Dari jumlah tersebut terdapat pencari kerja/penganggur sebanyak 19.219 orang atau 2,13% dari jumlah angkatan kerja.

Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa selama 10 tahun terjadi penurunan jumlah pencari kerja/penganggur sebanyak 8.346 orang atau 1.75%. Penurunan tersebut adalah sebagai akibat dari berhasilnya pembangunan di dalam membuka kesempatan kerja.

Keluarga Berencana

Usaha melembagakan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) di Daerah Nusa Tenggara Barat telah dapat menun-

- *UKS (Usaha Kesehatan Sekolah = Efforth of **School Health**), UKGS (Usaha Kesehatan Gizi Sekolah = **School Nutrition Halth**)*
- *KIA (Kesehatan Ibu dan Anak = **Mother and Infant Health, KB (Keluarga** Berencana = Family Planning).*

Instruction on Public Health is aimed to improve Public Knowledge, attitude and behaviour towards healthy living. The efforts are directed to increase public participation to benefit from facilities of available health service and to improve knowledge and vocational skills in order to be able to overcome health problems confronted by means of increasing communication and dissemination of health information.

The priority programmes executed are environment health, improvement of nutrition, KB / population, immunization of Balita (dibawah lima tahun = under 5 years old infants), increase and promotion of participation of community's self supporting. In execution of the activities, fund is obtained through central or regional administration which increases every year. The fund mentioned above is used for instruction activities in the form of mass approach, health campaign, provision of communicatin media, lectures, discussions, demontrations and promotion of community participation.

UKS covers health reducation, creation of healthy school environment and school health services directed to increase health status of school children.

Activities executed are as follows:

- *Early detection of abnormality and preliminary therapy by school teachers who have been educated and trained to carry out UKS.*
- *To find extraordinary school children in the regions covered by UKS.*

Until non UKS has reached 956 SD (Primary Schools) and 129 Madrasah (Islamic School), 21 SLTP and the teachers who have been upgraded are as follows :

Teachers of SDN (Public SD) amounting to 2,479 persons, Madrasah amounting to 129 persons, SLTP amounting to 420 persons and SLTA amounting to 309 persons. Besides, protection/prevention agains dental deseases among pupils of SD through UKGS up to present time has covered 7,513 persons of old pupils and 5,814 persons of new pupils.

Effoerts executed to increase health service towards mothers and infants are as follow :

- *Periodic weight-check of Infants and Balitas.*
- *Supply of extra-food for undernutrition children.*
- *Family health service.*
- *Instruction on Nutrition in the form of demonstration of nutrition.*
- *Courses fomidwives.*

At present 1,685 dukuns (traditional midwives) have been trained from the avilable 3,306 dukuns and DUKUN KITs are given to those who have taken the courses.

5. Population and Family Planning.

Population

The number of population in West Nusa Tenggara according to the census of 1971, was registered at 2.2 million people.

Of the total number there were 27,565 persons of job hunters/unemployeds or 3.88% of the total labour-force. The census of 1980 registered the population number at 2.7 millions. Out of the stated number there were 19,219 job hunter/ unemployeds or 2.13 % of the total labour - force.

The figures show that during 10 years there was a decrease in the number of job hunters/unemployeds, namely 8,346 persons or 1.76 % of the total labour-force.

The stated decrease was as a result of successful development in opening employment opportunity.

Family Planning

The effort to popularize the NKKBS (Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera = Norm of happy and properous Small Family) in West Nusa Tenggara has shown positive result. This is not only indicated by the participation of PUS (Pasangan Usia Subur = Fertile age couple) as permanent acceptors, even this family planning programme is also able to motivate efforts of cultivating responsibility among the community to undertake own problems, mainly in cases relating to population aspects.

Groups of acceptors have grown in remote areas directly managed by PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga = Education of Family Welfare). These acceptors groups are gradually directed to function as productive economic groups capable of increasing the income of the family/community. In this case the acceptor groups are managed by KUDs (Koperasi Unit Desa = Rural Cooperatives Unit) so that on one side Cooperatives will serve accep-

jukkan hasil-hasil yang positif. Hal ini tidak saja ditandai dengan keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggi sebagai peserta lestari, bahkan program KKB ini mampu mendorong usaha penumbuhan rasa tanggung jawab masyarakat untuk secara aktif mampu mengelola serta memecahkan masalahnya sendiri terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek kependudukan.

Kelompok-kelompok akseptor telah tumbuh di pelosok-pelosok pedesaan langsung dibina oleh PKK di desa. Kelompok Akseptor ini lambat laun diarahkan untuk berfungsi sebagai kelompok ekonomis produktif sehingga mampu secara bertahap meningkatkan pendapatan keluarga/masyarakat (Income Generating). Dalam hubungan ini kelompok akseptor dibina oleh KUD sehingga secara timbal balik Koperasi akan memberikan pelayanan kepada akseptor menjadi anggota Koperasi. Demikian pula para petani yang tergolong dalam kontak tani diarahkan menjadi kelompok akseptor.

Keterpaduan program inilah yang dikenal sebagai program Dharma Partasigana (Dharma Wanita, Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana).
Dengan keterpaduan program ini diharapkan terjadi penurunan fertilitas/laju pertumbuhan penduduk.

Adapun hasil-hasil yang telah dicapai dalam program KKB di Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. *Peserta KB baru.*
   - Tahun 1981/1982 : target : 40.000 peserta
     Pencapaian : 78.224 peserta atau 195,50 %.
   - Sejak 1974/1975 sampai dengan 1981/1982 peserta Keluarga Berencana Baru secara kumulatif : 269.564 atau 65,21% dari seluruh PUS di Daerah Nusa Tenggara Barat.

   Hal ini berarti sebagian besar Pasangan Usia Subur di Daerah Nusa Tenggara Barat telah pernah memakai salah satu alat kontrasepsi.

2. *Peserta KB Aktif.*
   - 1981/1982 : target : 81.083 peserta
     Pencapaian : 172.037 peserta atau 212,17 %
   - Hal ini berarti bahwa 41,02% dari seluruh PUS (413.370 pasangan) tetap aktif memakai alat kontrasepsi.
   - Keadaan ini telah menempatkan Nusa Tenggara Barat pada urutan kelima dari seluruh Propinsi di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali atau pada urutan pertama diluar Jawa - Bali. (Lihat Tabel IV - 7 dan Tabel IV - 8).

tors and acceptors groups, and on the other side acceptors and acceptors groups become member of cooperatives. Likewise, farmers who belong to farmer groups are directed to become acceptor groups.

This integration of programme is popularly known as programme of Dharma Partasigana (Dharma Wanita, Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana = Women's organization, Agriculture, Cooperatives, and Family Planning). With the integration of programme, it is expected to decrease the fertility/growth rate of population.

Goals achieved in family planning programme in West Nusa Tenggara were as follows :

1. New KB Acceptors

- *In 1981/1982 : Target 40,000 acceptors*
  Achievement 78,224 acceptors or 195.50%

- *Since 1974/1975 up to 1981/1982 the comulative new KB acceptors were : 269,564 or 65.21 % of whole PUS in West Nusa Tenggara.*

This means that most PUS in West Nusa Tenggara had ever type of contraceptives.

2. Active KB Accept

- *In 1981/1982 : target 81,083 acceptors*
  achievement 172,037 acceptors or 212.17%
- *This means that 40.02 % of the whole PUS (413,370 couples) kept on using contraceptives.*
- *This condition had placed West Nusa Tenggara to the fifth rank in Indonesia after East Java, Central Java, Special Area of Yogyakarta and Bali, or the first position outside Java-Bali See Tables IV−7 and IV−8.*

6. *Social Welfare*

Activities for the promotion of social welfare are executed in forms of social guidance, social self help trainings, incentive aid of instrument, and materials and efforts to form productive work groups. In 1978 social aid and guidance were given to 214 poor families who spread over 3 districts of Lombok Island.

The effort increased every year. During the first 4 years of Repelita III (Five year − Development Plan) promotion could cover 7,698 poor families spread over 6 districts.

Tabel / *Table IV - 7*
BANYAKNYA KLINIK KB DAN PKBRS DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN : 1979 - TAHUN 1984
NUMBER OF KB CLINICS AND PKBRS IN WEST NUSA TENGGARA, 1979 — 1984

Kabupaten/Unit Pelayanan *District/Service Unit*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
2	3	4	5	6	7	8
LOMBOK BARAT/***WEST LOMBOK***		13	13	3	33	34
Klinik KB/KB Clinics						
- P K B R S	1	1	1	1	2	2
LOMBOK TENGAH						
- Klinik KB/KB Clinics	20	15	15	15	25	25
- P K B R S	1	1	1	1	1	1
LOMBOK TIMUR						
- Klinik KB/KB Clinics	22	14	14	14	30	32
- P K B R S	1	1	1	1	1	1
SUMBAWA						
- Klinik KB/KB Clinics	30	17	17	20	21	
- P K B R S	1	1	1	1	1	1
DOMPU						
- Klinik KB/KB Clinics	9	7	7	7	10	10
- P K B R S	1	1	1	1	1	1
BIMA						
- Klinik KB/KB Clinics	22	22	16	16	21	21
- P K B R S	1	1	1	1	1	1
NTB						
- Klinik KB/KB Clinics	124	82	82	82	139	143
- P K B R S	6	6	6	6	7	7

Sumber : BKKBN Propinsi Nusa Tenggara Barat
Source : National Family Planning Coordinating Board, West Nusa Tenggara Office.

Tabel / *Table IV - 8*

BANYAKNYA PENCAPAIAN AKSEPTOR BARU KELUARGA BERENCANA DIPERINCI MENURUT KABUPATEN DAN METHODE KONTRASEPSI YANG DIPERGUNAKAN TH 1979/80 - 1984/85

ACHIEVEMENT OF NEW KB ACCEPTORS DETAILED BY DISTRICT AND CONTRACEPTIVE METHOD USED 1979/80 - 1984/1985

No	Kabupaten *District*	Kontrasepsi *Contraception*	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85
1	Lombok Barat/ *West Lombok*	- IUD *Spiral*	1.789	2.317	2.729	5.195	6.749	5.166
		- Pill/*Pills*	5.309	12.289	13.983	8.219	5.268	10.640
		- Kondom/*Rubber*	387	350	773	203	237	416
		- Lainnya *Miscellans*	373	688	1.076	230	242	226
2	Lombok Tengah	- IUD/*Spiral*	891	368	824	2.334	4.564	3.144
		- Pill/*Pills*	6.910	14.336	12.783	8.266	6.448	8.618
		- Kondom/*Rubber*	206	736	1.308	95	83	16
		Lainnya *Miscellans*	19	91	162	-	-	-
3	Lombok Timur *East Lombok*	IUD/*Spiral*	252	386	970	1.964	5.679	2.891
		- Pill/*Pills*	8.183	17.336	20.064	12.848	4.242	11.246
		- Kondom/*Rubber*	359	652	741	246	73	106
		- Lainnya *Miscellans*	49	291	499	11	4	4
4	Sumbawa	IUD/*Spiral*	511	522	910	4.147	3.155	2.343
		- Pill/*Pills*	4.565	6.063	7.091	4.410.	4.690	4.636
		- Kondom/*Rubber*	227	347	541	183	88	126
		- Lainnya *Miscellans*	17	71	104	26	19	13
5	Dompu	IUD/*Spiral*	270	431	305	1.716	596	277
		Pill/*Pills*	1.080	2.089	2.477	2.068	1.813	474
		Kondom/*Rubber*	41	143	159	89	15	11
		Lainnya *Miscellans*	25	48	180	9	8	9
6	Bima	- IUD/*Spiral*	450	632	677	2.127	3.695	3.046
		Pill/*Pills*	2.472	5.532	7.664	7.681	5.787	6.011
		Kondom/*Rubber*	147	258	2.063	190	69	143
		Lainnya *Miscellans*	40	111	281	2	7	13
7	Nusa Tenggara Barat	IUD/*Spiral*	4.163	5.156	6.415	17.483	24.438	41.825
		- Pill/*Pills*	28.535	57.645	64.062	43.492	28.248	16.867
		- Kondom/*Rubber*	1.367	2.486	5.585	1.006	565	818
		Lainnya *Miscellans*	523	1.300	2.302	278	3.780	265

6. Kesejahteraan Sosial.

Kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial di laksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, latihan usaha swadaya, latihan usaha swadaya sosial masyarakat, pemberian bantuan stimulan peralatan sosial dan bahan serta usaha pembentukan kelompok-kelompok kerja produktif. Pada tahun 1978 telah diberikan bimbingan dan bantuan sosial keluarga/miskin sejumlah 214 keluarga miskin yang tersebar pada 3 Kabupaten di Pulau Lombok.
Usaha tersebut setiap tahun meningkat, sehingga selama 4 tahun Repelita III saja telah dapat dijangkau pembinaan terhadap jumlah keluarga miskin sebanyak 7.698 keluarga yang tersebar pada 6 Kabupaten.

Sedangkan mengenai pembinaan di bidang perumahan dan lingkungan, diarahkan kepada pemberian latihan bagi keluarga miskin agar berusaha membangun perumahan secara gotong-royong dengan memanfaatkan bahan-bahan bangunan yang tersedia di lingkungan setempat. Di samping itu digalakkan juga usaha pelestarian lingkungan hidup; untuk itu diberikan stimulan berupa bahan bangunan non lokal dan peralatan kerja.

Pada tahun 1978, telah diberikan stimulan kepada 61 keluarga pada 3 Kabupaten di Pulau Lombok. Kegiatan tersebut semakin meningkat sehingga selama 4 tahun Repelita III telah diberikan stimulan kepada 1.032 keluarga miskin yang tersebar pada 6 Kabupaten. Perkembangan pemberian stimulan berupa bahan bangunan non lokal dan peralatan kerjanya adalah sebagai berikut :

a Tahun 1978/1979 — 61 keluarga miskin.
b Tahun 1979/1980 — 62 Keluarga miskin.
c Tahun 1980/1981 — 180 Keluarga miskin.
d Tahun 1982/1983 — 540 keluarga miskin.

Sedangkan mengenai pembimbing sosial masyarakat (PSM) telah dilaksanakan pembinaannya yang dimaksudkan untuk melatih dan membentuk pekerja sosial lapangan. Pembangunan dari latihan pembimbing sosial masyarakat adalah :

Meanwhile the promotion of housing and environment is directed to provide trainings for poor families inorder to build houses in mutual iad by using local building materials. Besides, living environment preservation is encouraged, for that purpose incentives are given in forms of non-local building materials and work-instruments.

In 1978 incentive was given to 61 families in 3 districts in Lombok Island. The activities increased more and more so that during the first 4 years of Repelita III provision of incentives had covered 1,032 poor families spread over 6 districts. The growth of incentives of non-local building materials and work instruments can be persented as follows :

a. In 1978/1979 numbered 61 poor families.
b. In 1979/1980 numbered 62 poor families.
c. In 1980/1981 numbered 180 poor families.
d. In 1981/1982 numbered 540 poor families.

Meanwhile PSM (Pembimbing Sosial Masyarakat = Social Advisors) had been promoted to enhance trainings and cultivation of field workers of social welfare.

The social advisors training can be given as follows :

a. In 1978/1979 numbered 150 PSM
b. In 1979/1980 numbered 330 PSM
c. In 1980/1981 numbered 964 PSM
d. In 1981/1982 numbered 566 PSM
e. In 1982/1983 numbered 934 PSM

The promotion of welfare for isolated tribes had also been executed. The isolated in West Nusa Tenggara are included in the temporary settlement classification. Population of the isolated tribes can be explained as follows :

- *District of East Lombok : there were 149 families or 745 persons in Sembilia Sub District, managed since 1978.*
- *District of Sumbawa : there were 149 families o 745 persons in the villages of Pusu, Tepal Bou, Tangkam, Pulit, Batu Rata of Batu Dulang Village, managed since 1978.*
- *District of Bima : in the Sub District of Wawo, covering the Villages of*









Kunjungan Kerja Presiden bersama Ibu Tien Soeharto ke NTB merupakan wujud nyata perhatian Pemerintah terhadap hasil-hasil pembangunan. Pada bagian lain, foto-foto memperlihatkan fasilitas perhubungan yang sudah kian menjamin kegiatan perikehidupan masyarakat.

The official visit of President and Madame Tien Soeharto to West Nusa Tenggara is aimed at observing the realization of development in that area. Other photoes show the transportation facilities which have improved considerably.



Sebagai pelengkap untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat telah menyediakan berbagai fasilitas perkantoran. Seperti nampak dalam gambar, beberapa gedung perkantoran di propinsi Nusa Tenggara Barat.

In order to enhance the activities of the government machinery, the Local Government of West Nusa Tenggara has provided some office facilities. Seen in the pictures the office buildings in the Province of West Nusa Tenggara.









Kunjungan kerja Menteri Agama H Munawir Sadzali ke NTB merupakan bukti nyata bahwa perhatian Pemerintah terhadap pembangunan sektor keagamaan di NTB cukup besar. Jumlah peserta ibadah haji juga meningkat setiap tahunnya. Gambar atas adalah salah satu tempat beribadah kaum muslimin yang mempunyai nilai sejarah dan syiar Islam di NTB.

The Minister of Religious Affairs "H Munawir Sadzali" visited West Nusa Tenggara to observe the development of religious infrastructures. The number of haj pilgrims in this region increases annually. The above picture shows a place of worship of the Moslem community in West Nusa Tenggara.









Kekayaan budaya suatu bangsa bisa memberikan daya tarik khusus bagi para wisatawan. Seperti nampak dalam gambar, daya tariknya cukup besar untuk dinikmati. Sedang untuk keindahan alam, NTB menawarkan Pantai Tanjung Aan, Taman Nurmada, Taman Mayura dan Sanggigi untuk konsumsi turis.

The unique culture of one nation could invite the arrival of tourists to that country. In West Nusa Tenggara one could easily find many tourist resorts such as the Tanjung Aan Beach, Narmada Park, Mayura Park and the Senggigi Beach.













Sebagai dukungan terhadap pembangunan sektor pariwisata, propinsi NTB bisa menyuguhkan beberapa obyek wisata menarik. Antara lain: Pura Lingsar di Lombok Barat, Istana Tua Sumbawa, serta berbagai jenis tari dan kebudayaan menarik lainnya.

In the framework of supporting the development of tourism sector, the Government of West Nusa Tenggara has developed more tourist resorts such as the Lingsar Palace in West Lombok, the Sumbawa Old Palace and various kinds of traditional dances and others.





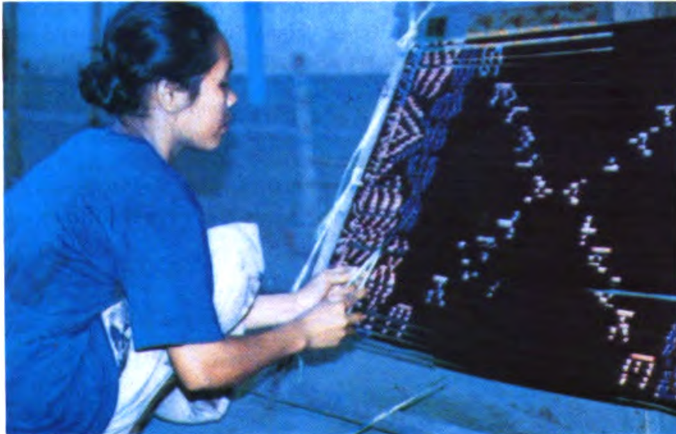














Disamping industri besar dan menengah, industri kerajinan juga berkembang pesat di NTB. Termasuk di dalamnya, industri perikanan dan rumput lautnya. Dalam gambar nampak pula Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam ketika meninjau pengolahan mesin kapas di Puyung, Kab Lombok Tengah

Beside the big and medium-scale industries, the small-scale industry such as fishing and sea weeds industries has developed rapidly in West Nusa Tenggara. Seen in the picture the Minister of Home Affairs watching a cotton processing industry at Puyung in the District of Lombok Tengah.









Peranan media elektronik seperti televisi besar pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di NTB. Terbukti dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan pertumbuhan penduduk melalui KB. Juga kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan. Sarana kesehatan berkembang pesat sesuai dengan harapan masyarakat, merupakan sarana yang pantas untuk lebih dikembangkan dan ditingkatkan.

The role of electronic medium (television sets) in influencing the livelihood of the West Nusa Tenggara people is remarkable. The increase of people's participation in the family planning and health programmes is thanks to the existance of the television broadcasting on those issues. Tremendous achievement has been made in the expansion of health infrastructures.



















Pembangunan yang sedang dilaksanakan dimaksudkan sebagai pemenuhan tuntutan kesejahteraan manusia. Disamping membangun manusianya, sarana lain berupa gedung dan bangunan juga perlu mendapatkan porsi yang wajar. Dalam gambar nampak pula Mensesneg Soedharmono ketika mengadakan pertemuan dengan Mahasiswa Universitas 45 Mataram, NTB.

The essence of national development is the development of the Indonesian man as a totality both materially and spiritually. The material and spiritual development should be done in a balanced manner. Seen in the picture the Minister of State Secretary Mr Soedharmono holding a meeting with the students of the Mataram University of West Nusa Tenggara.









a Tahun 1978/1979	158 PSM.
b Tahun 1979/1980	330 PSM.
c Tahun 1980/1981	964 PSM.
d Tahun 1981/1982	566 PSM.
e Tahun 1982/1983	934 PSM.

Terhadap suku terasing juga telah diadakan pembinaan kesejahteraannya. Suku terasing yang ada di Nusa Tenggara Barat termasuk klasifikasi menetap sementara. Populasi suku terasing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, terdapat di Kecamatan Sembelia 149 KK atau 745 jiwa, ditangani sejak tahun 1978.
- Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, terdapat di Kecamatan Batulanteh 149 KK atau 745 jiwa yang tersebar pada Desa Pusu, Tepal Bou, Desa Tangkam Pulit, Batu Rota Desa Batu Dulang, ditangani sejak tahun 1978.
- Kabupaten Daerah Tingkat II Bima, terdapat di Kecamatan Wawo yang meliputi Desa Maria 187 KK atau 945 jiwa yang ditangani sejak tahun 1980.

Pembinaan suku terasing ini mendapat jaminan dari Pemerintah berupa rumah sederhana, Balai pertemuan dan jaminan makanan dalam bentuk Natura selama 12 bulan.

Sedangkan Penyantunan anak terlantar diselenggarakan dalam Panti serta bimbingan dan bantuan di luar Panti Asuhan, untuk menyelenggarakan penyantunan dalam panti asuhan yang terdiri dari Panti Asuhan Pemerintah 1 buah dan Panti Asuhan Swasta 22 buah. Jumlah anak terlantar yang dapat disantun dalam Panti pada tahun 1978 sebanyak 492 anak sampai dengan tahun 1982/1983 meningkat menjadi 1.266 anak terlantar. Sedangkan penyelenggaraan penyantunan di luar Panti pada tahun 1978 sebanyak 1.682 anak, pada tahun 1982/1983 meningkat menjadi sebanyak 4.210 anak terlantar. Dengan demikian jumlah anak terlantar yang dapat disantun dalam Panti maupun luar Panti tahun 1978 sebanyak 2.174 anak, pada tahun 1982/1983 meningkat menjadi sebanyak 5.476 anak terlantar
Lihat Tabel Tabel IV - 9.

Maria ; there were 187 families 945 persons manged since 1980.

The promotion of the isolated tribes was provided by the Government to get simple houses, village council hall, and food aid for 12 months.

Meanwhile aid for destitue children was executed inside institution, guidance and aid outside institution, to provide assistance inside institution consisiting of unit of government orphanage and 22 units of private orphanage. The number of destitute children that could be assited inside Institution in 1978 was 492 children, increased in 1982/1983 to become 1,266 destitute children. Meanwhile, the assistance given outside institution in 1978 covered 1,682 children, increased in 1982/1983 to become 4,210 children. Thus, the number of destitute children that could be assisted inside institution as well as outside institution in 1978 were 2,174 children and in 1982/1983 became 5,476 children. See Table IV–9.

Assistance for eldarly people in intended to serve the very old because of physical and social conditions make it timpossible for them to live whitout other people's help. They are accomodated inside Instituion and at present number 100 persons. Besides, there are elderly people who are physically still capable to work, but with the dismal economic condition, they could impossible fulfill their daliy needs. Aid is given to them through non instituion. Up to the present time it covered 5,730 persons.

Rehabilitation of Loafers and Beggars is intended to guide and rechannel the loafers and beggars to reasonable life and living. Before they are channeled, they have got mental education and vocational training in Social welfare institution.

Through this effort, loafers and beggars had been employed in social settlement in Akar-akar location, District of West Lombok (± 90 families). Besides activities mentioned-above, there were also activities in Rehabilitation of physical defects. This effort is intended to give social service to physical defects so that they could adapt with their living environment. Aid for physical defects is carried out through non Institution system. Besides, there are also vocational skill trainings so that they are able to work.

In 1978, 600 physical defects had been assisted and vocational skill training covered 58 persons. In the first years of Repelita III efforts to assist physical defects who had got vocational skill trainings became 266 persons. Meanwhile another aid was given to victims of Natural Disaster and other disasters.

Tabel / Table IV - 9
JUMLAH PANTI DAN ANAK YANG DIASUH PADA PANTI ASUHAN DI SETIAP KABUPATEN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 1979/1980 - 1984/1985
NUMBER OF INSTITUTION AND ORPHANS BY DISTRICT IN WEST NUSA TENGGARA. 1979/1980 - 1984/1985

No	Kabupaten	1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983		1983/1984		1984/1985 *)	
	District	Panti *Institution*	anak asuh *Orphans*	Panti *Institution*	anak asuh *Orphans*	Panti *Institution*	anak asuh *Orphans*	Panti *Institution*	anak asuh *Orphans*	Panti *Institution*	anak asuh *Orphans*	Panti *Institution*	anak asuh *Orphans*
1	Lombok Barat/*West Lombok*	5	207	2	229	5	250	8	349	8	349	8	349
2	Lombok Tengah/*Central Lombok*	5	298	8	401	8	450	9	464	9	464	9	464
3	Lombok Timur/*East Lombok*	8	309	9	450	9	500	11	584	11	584	11	584
4	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dompu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bima	-	-	-	-	1	25	1	25	1	25	1	25
7	NTB	18	814	22	1.080	23	1.225	29	1.422	29	1.422	29	1.422

Sumber : Kanwil Departemen Sosial Prop NTB
Source : Regional Office, Ministry of Social Affairs, West Nusa Tenggara Province;
*) Data Sementara/***Preliminary Data.***

Sementara itu penyantunan Lanjut Usia/Jompo dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada para lanjut usia yang karena keadaan fisik dan sosialnya tidak memungkinkan mereka dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Terhadap mereka ini dilaksanakan penyantunan dalam satu Panti Wreda yang saat ini berjumlah 100 orang. Di samping itu terdapat pula para lanjut usia yang keadaan fisiknya masih memadai untuk bekerja, akan tetapi keadaan ekonominya sangat memprihatinkan sehingga kurang memungkinkan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kepada mereka ini diberikan bantuan melalui pelayanan luar Panti yang sampai saat ini berjumlah 5.730 orang.

Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis dimaksudkan untuk membimbing dan menyalurkan kembali pada gelandangan serta pengemis ke arah kehidupan, penghidupan yang wajar. Sebelum disalurkan mereka dapat gemblengan mental dan latihan kerja dalam Panti Sosial.

As it is known, West Nusa Tenggara is located in the line of Earthquake. Thus it relatively often suffers earth quake disaster. Other natural disasters that often happen are fire, hurricane, flood and sinking perahus. Efforts to over come such problems include :

a. Preventive

In this case activities are undertaken to promote community's and government apparatus readines for action in confronting natural disasters.

b. Represive

In the case efforts are executed to give aid for the victims after a natural disaster has taken place.

c. Rehabilitation

Efforts are directed to rehabilitate damages caused by natural disasters.

Melalui usaha ini telah berhasil disalurkan gelandangan dan pengemis pada pemukiman sosial di lokasi Akar-akar Kabupaten Lombok Barat kurang lebih 90 KK.

Di samping kegiatan di atas terdapat pula kegiatan di bidang Rehabilitasi Penderita cacat. Usaha ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sosial kepada para penderita cacat agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Penyantunan Penderita cacat dilaksanakan melalui sistim luar Panti. Di samping itu kepada para penderita cacat diberikan berbagai ketrampilan sehingga mampu berkarya. Pada tahun 1978 telah disantun 600 orang penderita cacat dan dilatih ketrampilannya sebanyak 58 orang. Dalam empat tahun Repelita III usaha penyantunan penderita cacat makin meningkat menjadi sebanyak 2.800 orang dan penderita cacat yang telah diberikan latihan ketrampilan meningkat menjadi 266 orang.

Sedangkan bantuan lain adalah bagi para korban Bencana Alam dan Bencana lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa daerah Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang terletak pada jalur Gempa Bumi. Oleh karenanya relatif cukup sering mengalami bencana alam gempa bumi. Bencana alam lain yang sering terjadi adalah kebakaran, angin topan, banjir dan perahu tenggelam. Usaha-usaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut antara lain :

a. *Usaha Preventif* :
Dalam hal ini telah diusahakan kegiatan pembinaan kesiap-siagaan masyarakat serta aparat pemerintah dalam menghadapi kemungkinan adanya bencana alam.

b. *Usaha Represif* :
Dalam hal ini dikembangkan usaha-usaha untuk meringankan para Korban dengan pemberian pelayanan bantuan pada saat setelah terjadi bencana alam.

c. *Usaha Rehabilitasi* :
Usaha ini ditujukan untuk merehabilitasi kembali kerusakan-kerusakan sebagai akibat bencana alam.

Khusus gempa bumi yang terjadi pada tahun 1979 telah mengakibatkan kerusakan prasarana peribadatan 498 buah, pendidikan 192 buah, kesehatan 72 buah, Pemerintahan 64 buah, Keamanan 10 buah dan prasarana perdagangan sebanyak 9.340 buah rumah diantaranya 3.977 rumah mengalami kerusakan berat. Dengan bantuan dari berbagai fihak, telah berhasil direhabilitasi sebagian besar dari pada kerusakan seperti prasarana peribadatan 412 buah, pendidikan 56 buah, Kesehatan 3 buah, dan Prasarana Pemasaran 73 buah, perumahan penduduk 200 buah dan yang sedang berjalan usaha rehabilitasi perumahan penduduk 1.000 buah, yakni dari bantuan Yayasan HIVOS Belanda.

7. Perumahan Rakyat

Dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, telah dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, khususnya pemenuhan keperluan pokok rakyat banyak yang makin merata dan adil. Salah satu kebutuhan pokok tersebut adalah perumahan. Pembangunan perumahan dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu pembangunan perumahan pegawai/dinas, pembangunan perumahan sederhana/inti, pemugaran perumahan, pembangunan rumah contoh, pembangunan rumah dengan sistem stimulan berantai dan lain-lain, baik di pedesaan maupun di kota. Serta usaha untuk menyediakan bahan bangunan dengan harga yang yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Juga mengadakan penelitian untuk pengembangan bahan bangunan lokal serta yang tak kalah pentingnya adalah penyuluhan kepada masyarakat.

Pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh swasta dan masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mewujudkan perumahan yang memenuhi persyaratan teknis, estetis, kesusilaan, kesehatan dan lain-lain. Keadaan perumahan dan lingkungan sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan pribadi setiap orang, dan dengan demikian merupakan faktor yang penting dalam pembinaan bangsa, Adalah merupakan kewajiban masyarakat bersama-sama Pemerintah untuk mengusahakan secara bertahap terwujudnya perumahan yang memenuhi fungsi-fungsi rumah, yaitu : kenikmatan dan keamanan; kemerdekaan; penghidupan yang sehat; dan menjamin pergaulan dalam masyarakat.

Pada saat dimulainya Pelita II keadaan perumahan rakyat di Nusa Tenggara Barat sangat sederhana, dibangun dari bahan yang kurang memenuhi syarat-syarat teknis, kesehatan dan keamanan dari bahaya kebakaran. Di pulau Lombok dinding rumah dibuat dari tanah. Jendela dan ventilasi sangat kurang. Atap dari alang-alang sehingga mudah terbakar dan dan tak ada WC dan kamar mandi. Serta lingkungan yang tidak teratur.

Di Pulau Sumbawa, perumahan rakyat umumnya berupa rumah panggung, dengan bahan-bahan tiang dari kayu, dinding dari papan atau bambu, konstruksi amat sederhana serta tak ada WC dan kamar mandi.

The earthquake in 1979 had damaged infrastructures of worship numbered 192 units, health 74 units, government 64 units, security 10 units, and infrastructures of trade 9,340 buildings of which 3,977 houses were seriously damaged. By aid from various quarters most of the damages had been rehabilitated such as infrastructures of worship numbered 412 units, education 56 units, health 3 units, and infrastructures of marketing 73 units, people's houses 200 units and 1,000 units of houses were rehabilitated under assistance of the Dutch HIVOS Foundation.

7. Public Housing

In the framework of increasing Public Standard of Living, developments has been executed in various fields, especially for public basic needs with just and equitable distribution. One of the basic needs in housing. Housing development is executed in various types. namely official house development ordinary house development, house restoration, pilot project house development, stimulating-effect system of house development and miscellany, in rural areas as well as in urban areas, and efforts to provide building materials with prices within reach of people's purchasing capacity. Research is also done on local building materials development and public instruction is no less important.

Housing development is executed by the government as well as by private sector and the community. The development is expected to manifest in housing that meets technical, esthetics, moral, health requirements etc. The condition and environment of housing influence the spirit and identity of everybody which hold an important role in the nation building. It is a duty of the community and the government to attempt inphase the manifestation of housing that metts the functions of a house namely : comfort and security; freedom; healthy living; and enhancement of community association.

At the begining of Pelita II, the condition of public housing in West Nusa Tenggara was very simple, built of materials that did not fulfill the technical and health requirements and security from fire. In Lombok Island the wall of houses are made of earth. The houses do not have adquate windows and ventilation. The roofs are made of tall grass so they are very vulnerable to fire. There are no toilet and bathroom. The envionment is not orderly.

In Sumbawa Island public housings are provided with wood poles and stage. Walls are made of wood or bamboo. The construction is very simple and there are no toilet and bathroom. Bazed on the existing condition and problems public housing plan is emphasized on activities of consultation, courses, provision of healthy and cheep pilot project house, research on local materials that can become building materials, provision of machines / intruments of building material process, research on processing of low quality materials to become perserved and durable materials.

Upholding to the development target of public housing as mentioned-above, in general it can be said to have realized more stable condition such as understanding/public awereness towards the importance of housing and helthy environment, with better building materials. Such a condition is a strong base to conitinue the next public housing development. The efforts to achieve target of physical development has showing a favorable result although obstacles still exist in the execution of the said development.

In the effort to fulfill official housing need of Public Servents, during Pelita II only 126 houses had been established with APBD (Regional Budget) and APBN (National Budget) funds and 70 houses with BTN (State Saving Bank) fund, consisting of 50 units of T54 type and 20 units of T-42 type located in Mataram. The housing development is not yet wholly equipped with environmental infrastructures such as Kindergarten, parks, open squares, sanitarian drainage, etc.

In Pelita III 514 simple houses and 500 small houses had successfully been established through Perum Perumnas (Perusahaan Umum Perumahan Nasional = National Urban Development Corporation) located in the District of West Lombok. While in other districts activities are in preparatory implementation.

Besides, provision of public housing had also been executed through BTN. Up to the present time it had successfully realized credit for the development of 412 houses. The development of public housing through BTN has only been executed in two districts, namely West Lombok and Bima.

In the effort of rural housing development, restoration / housing development has been executed by stimulation, welfare housing by mutual aid and natural disaster, amounting to 3,252 units. Rural housing restoration is an integration between government effort to give aid and self-helf of the community. Problems confronted in healthy housing development for rural population, especially in Lombok Island, include the close vicinity between a house and another, unclear limit of house-yard, density of population, low quality of building materials, habit of the people to put cattles in house-yard, and the law income of most rural population so they could not afford to build houses that meet health and technical requirements.

During Pelita II rural housing restoration was still limited to pioneering effort. Restoration of housing and rural environment covered 1,377 units spread

Dengan berlandaskan pada kondisi dan permasalahan yang ada maka rencana pembangunan perumahan rakyat ditekankan pada kegiatan penyuluhan, kursus-kursus, mengadakan rumah contoh yang murah dan sehat, mengadakan penelitian terhadap bahan-bahan setempat yang dapat dikembangkan untuk menjadi bahan bangunan, mendatangkan alat-alat/mesin pengolahan bahan bangunan, penelitian cara-cara pengawetan dari bahan-bahan yang rendah mutunya menjadi bahan-bahan yang awet dan tahan lama.

Dengan berpegang pada sasaran pembangunan perumahan rakyat sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan telah dapat diwujudkan keadaan yang lebih mantap berupa pengertian/kesadaran masyarakat dan arti pentingnya perumahan dan lingkungan yang sehat, dengan kualitas bahan bangunan yang lebih baik. Keadaan tersebut merupakan landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan perumahan rakyat pada tahap berikutnya. Demikian pula halnya dalam usaha pencapaian target pembangunan fisik telah menunjukkan hasil yang meyakinkan meskipun masih dijumpai ataupun masih muncul hambatan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan perumahan dinas bagi Pegawai Negeri, selama Pelita II saja telah dibangun 126 unit rumah dengan dana dari APBD dan APBN 70 unit rumah dengan dana Bank Tabungan Negara yang terdiri dari 50 unit type T-54 dan 20 unit rumah type T-42 berlokasi di Mataram. Pembangunan perumahan tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dengan prasarana lingkungan seperti taman kanak-kanak, pertamanan, lapangan terbuka, saluran sanitasi dan lain-lain.

Dalam Pelita III pengadaan perumahan rakyat melalui Perum Perumnas telah berhasil dibangun sebanyak 514 unit rumah sederhana dan 500 unit rumah inti yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. Sedang pada Kabupaten lainnya sedang dipersiapkan pelaksanaannya.

Disamping itu pengadaan perumahan rakyat telah dilaksanakan juga melalui Bank Tabungan Negara yang sampai dengan saat ini telah berhasil direalisir kredit untuk membantu perumahan rakyat sebanyak 412 rumah.

Pembangunan perumahan rakyat melalui Bank Tabungan Negara (BDN) baru dilaksanakan pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima. Lihat Tabel IV-10.

Tabel / *Table IV - 10*

JUMLAH PERUMAHAN RAKYAT YANG DIBANGUN MELALUI PERUMNAS, BTN DAN JUMLAH PERBAIKAN KAMPUNG TAHUN 1978-1982/1983

NUMBER OF PUBLIC HOUSING ESTABLISHED THROUGH PERUMNAS, BTN AND VILLAGE RESTORATION, 1978 - 1982/1983

No	Uraian *Legend*	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan rumah melalui Perumnas (unit) *Housing Development through Perumnas (Unit)*	-	1.014	-	-
2	Pembangunan rumah melalui BTN (unit) *Housing Development through BTN (Unit)*	32	60	120	200

Dalam usaha pembangunan perumahan pedesaan telah dilaksanakan pemugaran/pembangunan rumah dengan diberikan stimulan, perumahan kesejahteraan gotong-royong dan bencana alam sejumlah 3.252 unit rumah. Pemugaran perumahan pedesaan merupakan perpaduan usaha pemerintah memberi bantuan dengan swadaya masyarakat. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan rumah sehat bagi penduduk pedesaan khususnya di Pulau Lombok adalah rapatnya jarak rumah satu dengan lainnya, batas pekarangan yang tidak jelas, penduduk yang terlalu padat, bahan bangunan yang mutunya kurang memadai, kebiasaan penduduk mengandangkan ternaknya di halaman rumah serta rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk desa, sehingga kurang mampu untuk membangun rumah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan persyaratan teknis.

Dalam Pelita II usaha pemugaran perumahan desa baru terbatas pada usaha perintisan. Untuk itu telah dilaksanakan pemugaran perumahan dan lingkungan desa meliputi 1.377 unit rumah yang tersebar pada 30 desa dengan perincian sebagai termuat dalam Tabel IV-11 dan IV-12.

Sedangkan dari Proyek Bimbingan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat untuk Bidang Perumahan Sejahtera Gotong-royong (stimulan berantai) selama Pelita II telah membangun untuk 219 Kepala Keluarga.

over 30 villages. See Table IV-11 and IV-12.

While guidance and Public Welfare Development Project in the field of Mutual-aid Welfare Housing (Chained stimulation) during Pelita II had built houses for 219 families.

Besides, in over coming the aftermath of natural disasters, in cooperation with and assistance of CARE, 500 Houses had been established, namely 120 units in Teluk Awang (central Pombok) and 380 units in East Lombok (in Rempung 118 units and in Trianggabaya 162 units).

Tabel / *Table IV - 11*

PROYEK PERINTIS PEMUGARAN PERUMAHAN NTB (DINAS PEKERJAAN UMUM)

HOUSING RESTORATION PILOT PROJECTS IN WEST NUSA TENGGARA

No	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Lokasi *Location*	Jumlah Rumah *Total*	Jumlah Biaya *Total Expense* *Rp*	Keterangan *Explanation*
1	1974/1975	-	-	-	-
2	1975/1976	1	7	1.000.000	Lombok Barat *West Lombok*
3	1976/1977	2	100	8.220.000	Lombok Barat, West Lombok Lombok Tengah *Central Lombok*
4	1977/1978	6	300	24.688.000	se Pulau Lombok *Through Lombok Island*
5	1978/1979	11	440	43.002.000	se NTB West Nusa Tenggara
		20	847	76.910.000	

Efforts of rural housing restoration since 1979/1980 up to 1982/1983 covering 257 villages had succesfully been undertaken.

And so 49.20 % of the total villages in West Nusa Tenggara had been covered. The rural housing restoration had covered 2 self-help villages, 258 self-initiated villages and 18 self-supporting villages spreed over 6 Districts.

Meanwhile, the effort of villages rehabilitation in Pelita III just reached areas of 140 ha located in Dasan Agung Village, West Lombok. This activity covered the establishment of environmental roads, drainage, piped-water, MCK (Mandi Cuci Kakus = Public bath, wash and toilet) and waste dump. The total number of population who benefit from the village rehabilitation were ± 37,500 persons. The stated effort will be developed further in the future according to existing ability.

Clean Water Supply

At the beginning of Pelita II the whole population in West Nusa Tenggara who lived in the cities as well as in rural areas, got drinking water from wells, water resource and river located near respective villages. With such condition, the problem was when dry season came the water of well and rivers locked so that it was difficult to fulfill the need for drinking water.

In view of the limited available fund and forces in the region in overcoming the afore-said problems, attempts had been made to get the Central government attention to make it a National Project in West Nusa Tenggara. Target to be achieved in clean water infrastructure development during Pelita II in West Nusa Tenggara was the infrastructure development of clean water supply for the cities of Mataram, Praya and Bima.

During Pelita II clean water infrastructure had been built in the cities of Mataram, Praya, Raba Bima and Dompu with respective capacities of 400 litres, 150 litres, 6 litres and 17 litres per second. The capacity of clean water supply could serve about 114,600 families. In the effort of providing clean water for rural areas during Pelita II, 2307 units of shallow pump wells and 55 units of deep pump wells as well as 2 units of Hydrant pumps had been in installed in the villages of Sumbung and Duman, in addition to 20 pipe networks, 71 rain water reservoirs and 35 water springs preservation.

In the effort of clean water supply in the cities of West Nusa Tenggara, foreign and Central Government aids had been attempted, so that the situation included in Table IV-13 could be achieved.

8. Law

Promotion and development of law are directed to make law be able to fulfill the need in accordance with development so that legal order and certainty can be created.

Steps of the policy cover the promotion of law, law enforcement, promotion of the judiciary, legal aid, promotion on of immigration and legal consultation/instruction.

The time of law promotion is the drafting and establishing of legislation to support the regional development. Besides the national legal products produced

Tabel / *Table IV - 12*

PROYEK PENGEMBANGAN PEMUGARAN PERUMAHAN PEDESAAN (DIT BANGDES)

DEVELOPMENT OF RURAL HOUSING RESTORATION (DIRECTORATE OF RURAL DEVELOPMENT).

No	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Lokasi *Location*	Jumlah Rumah *Total Rp*	BIAYA (JUTAAN Rp)/ *EXPENSE (MILLION Rp)*		Keterangan *Explanation*
				APBN *National Budget*	Swadaya *Auto Activity*	
1	1977/1978	3	180	8	20,25	Lombok Barat *West Lombck* : Tanah Beaq Lombok Timur *East Lombok* : Aikmel Dompu : Monta Baru
2	1978/1979	7	350	16	15,35	Lombok Barat *West Lombok* : Pagutan Lombok Tengah *Central Lombok* : Puyung Lombok Timur *East Lombok* : Terara Sumbawa : Kuang Dompu : Ranggo, Kempo Bima : Leo
		10	530	24	35,60	

Selain daripada itu dalam usaha menanggulangi akibat bencana alam, dengan kerjasama dan bantuan CARE telah dibangun 500 buah rumah yaitu 120 buah di Teluk Awang Lombok Tengah dan 380 buah di Lombok Timur (di Rempung 118 buah, dan di Pringgabaya 162 buah rumah).

Usaha pemugaran perumahan desa sejak tahun 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983 telah berhasil dipugar sebanyak 257 Desa.

Dengan demikian jumlah Desa yang sudah terjangkau adalah 49,20% dari keseluruhan Desa yang ada pada Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

Apabila diamati lebih lanjut pelaksanaan pemugaran perumahan Desa tersebut telah mencakup 2 (dua) Desa Swadaya 258 Desa Swakarya dan 18 Desa Swasembada yang tersebar pada enam Kabupaten.

Sementara itu, usaha perbaikan kampung dalam Pelita III baru dapat menjangkau areal seluas 140 ha yaitu terletak pada kampung Dasan Agung Lombok Barat. Kegiatan ini meliputi kegiatan pembuatan jalan lingkungan, saluran air kotor, saluran air bersih, MCK dan pembuangan sampah.

Jumlah penduduk yang dapat menikmati usaha perbaikan kampung itu sekitar ± 37.500 orang. Usaha-usaha tersebut untuk masa-masa yang akan datang dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Air Minum/Air Bersih

Pada saat dimulainya Pelita II, seluruh penduduk di Nusa Tenggara Barat baik yang bertempat tinggal di kota maupun di desa, air minum yang diperlukan tersebut diperoleh dari sumur, mata air dan dari sungai-sungai yang letaknya berdekatan dengan Desa masing-masing. Dengan kondisi demikian, secara umum masalahnya adalah apabila musim kemarau tiba, maka air sumur dan juga sungai-sungai berkurang sekali airnya sehingga kebutuhan akan air bersih sulit dipenuhi.

Menyadari akan terbatasnya kemampuan dana dan daya yang tersedia di daerah dalam mengatasi masalah tersebut diatas, secara bertahap telah diperjuangkan untuk mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Pusat untuk dapat dijadikan proyek Pelita Pusat di Daerah Nusa Tenggara Barat. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan prasarana air minum pada Pelita II Nusa Tenggara Barat adalah pembangunan prasarana air minum untuk kota Mataram, Praya dan Bima.

Selama Pelita II telah dibangun prasarana air bersih di Kota Mataram, Praya, Raba Bima dan Dompu dengan kapasitas masing-masing 400 liter, 150 liter, 6 liter dan 17 liter per detik. Kapasitas produksi air bersih tersebut dapat dipakai untuk melayani kebutuhan sekitar 114.600 KK. Dalam usaha penyediaan air bersih untuk daerah pedesaan, selama Pelita II telah dipasang 2307 buah SPT Dangkal dan 55 buah SPT Dalam, 2 buah Pompa Hydran di Desa Sembung dan Desa Duman, telah pula dipasang 20 buah perpipaan, 71 buah penampungan air hujan dan 35 buah perlindungan mata air.

Dalam usaha penyediaan air bersih di kota-kota di Nusa Tenggara Barat telah diusahakan melalui bantuan luar negeri dan dari Pemerintah Pusat. Lihat Tabel IV-13.

by the central Government, the regional Administration of West Nusa Tenggara Province since 1978 up to 1983 had produced 63 units of Regional Regulations, with the details as follows :

- *In 1978 there were 2 units of Regional regulations issued.*
- *In 1979 there were 12 units of Regional Regulations issued.*
- *In 1980 there were 16 units of Regional Regulations issued.*
- *In 1981 there were 12 units of Regional Regulations issued.*
- *In 1982 there were 10 units of Regional Regulations issued.*
- *In 1983 there were 11 units of Regional Regulations issued.*

In preventive control over legal products produced by the District Administration, 285 units of Regional Regulation of Districts throughout West Nusa Tenggara had been approved with details as included in Table IV – 14.

Besides, a number of the Governor's Instructions and Decrees as implementation of the Regional Regulations as well as higher regulations had been approved. Inventory and codification of regulations had also been implemented in-accordance with respective fields or problems.

Cooperation had been fostered with University circles, others in the research on the application of regional regulations and legal consultations to the community.

The problem of law promotion needs to be seriously atended to in its relation with the security of development in the fields of economy, social-culture, politics and security and order. In this relation, efforts had been undertaken to promote and synchroniz the stability and coordination among regional authorities in drafting the regional regulation. Likewise, the increase of cooperation between the Regional Government and the Regional House of Representatives has enhance a better-directed, productive and efficient legislative process.

The aim of the promotion of the judiciary is to realize speedy, simple and low-cost court proceedings which fulfill a sense of justice among the public. Various efforts have been undertaken in the framework of achieving this goal.

Tabel / *Table IV - 13*

KAPASITAS PRODUKSI & PELAYANAN AIR BERSIH TAHUN 1982/1983

CAPACITY OF PRODUCTION AND SERVICES OF CLEAN WATER 1982/1983

No	Kabupaten *District*	URAIAN/*LEGEND* Kapasitas Produksi liter/detik *Capacity of Production Litre/Second*	Sambungan Rumah (buah) *Installation to house (Units)*	Hydran Umum (buah) *Public Hidrant (unit)*	Penduduk yang dilayani (orang) *Population Serves (Person)*	Keterangan *Explanation*
1	Lombok Barat/ *West Lombok*	130	3.960	71	53.800	
2	Lombok Tengah *Central Lombok*	60	950	37	18.900	
3	Lombok Timur/ *East Lombok*	30	872	57	18.120	
4	Sumbawa	60	640	52	16.800	
5	Dompu	32	642	37	13.820	
6	Bima	38	721	40	15.210	
	Jumlah/*Total*	348	7.585	294	134.850	

8. Hukum

Pembangunan dan pembinaan di bidang Hukum diarahkan agar Hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian Hukum.

Langkah-langkah kebijaksanaan meliputi pembinaan Hukum, penegakan Hukum, pembinaan peradilan, bantuan Hukum, pembinaan masyarakat keimigrasian dan penyuluhan Hukum.

Tujuan pembinaan Hukum adalah penyusunan dan pemantapan perangkat perundang-undangan yang menunjang pembangunan Daerah. Disamping produk-produk hukum yang bersifat nasional yang dihasilkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sesuai dengan tahun 1983 kegiatan penyusunan perundangan-undangan telah menghasilkan 63 buah Peraturan Daerah, dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 1978 2 buah Peraturan Daerah.
- Tahun 1979 12 buah Peraturan Daerah.
- Tahun 1980 16 buah Peraturan Daerah.
- Tahun 1981 12 buah Peraturan Daerah.
- Tahun 1982 10 buah Peraturan Daerah.
- Tahun 1982 11 buah Peraturan Daerah.

Dalam rangka pengawasan preventif terhadap produk-produk Hukum yang dihasilkan oleh Daerah Tingkat II maka telah disyahkan sejumlah 285 buah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II se-Nusa Tenggara Barat. Lihat Tabel IV-14.

Selain dari pada itu telah ditetapkan sejumlah Instruksi Gubernur Kepala Daerah dan Keputusan-keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah maupun Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Disamping itu pula telah dilaksanakan usaha inventarisasi dan kodifikasi Peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang atau permasalahannya masing-masing.

Kerja sama yang telah dilaksanakan dengan kalangan Universitas antara lain dalam penelitian pelaksanaan Peraturan Daerah dan penyuluhan Hukum kepada masyarakat telah banyak menunjang usaha-usaha di bidang penelitian pembinaan Hukum dan perundang-undangan.

Masalah pembinaan Hukum adalah merupakan suatu hal yang perlu memperoleh perhatian sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan pengamanan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Dalam hubungan ini telah dilaksanakan peningkatan dan pemantapan sinkronisasi dan koordinasi antara instansi-instansi Daerah dalam hal ini perancangan peraturan perundang-undangan. Demikian pula peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga proses legislatif dapat lebih terarah, produktif dan efisien.

Tujuan pembinaan Peradilan ialah untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang ringan serta memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut telah dilakukan berbagai usaha.

Penambahan tenaga-tenaga personil dan peningkatan keterampilan dan kemampuan teknis para penegak Hukum antara lain melalui Penataran KUHP dan pengarahan-pengarahan dalam bidang administrasi dan Peradilan. Perluasan dan Penambahan Prasarana dan sarana mobilitas antara lain pembangunan gedung/Kantor Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan pengadaan kendaraan bermotor.

Dalam rangka usaha pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan Hukum telah dirintis pemberian bantuan hukum untuk kasus perkara pidana bagi yang tidak mampu dan bantuan konsultasi hukum melalui Fakultas Hukum Universitas Mataram. Disamping itu diselenggarakan pula Inventarisasi putusan-putusan Pengadilan, dan Penyuluhan Hukum bekerja sama dengan media pers, alim ulama, RRI, TVRI dan Tokoh-tokoh kesenian. (Lihat Tabel IV - 15).

Tujuan penegakan hukum ialah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum melalui pembinaan kesadaran hukum sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta pembinaan sikap mental, kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan berbagai langkah dan usaha di bidang penegakan hukum meliputi peningkatan kemampuan pelaksana, penyuluhan hukum dan intensifikasi kegiatan.

Peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas umum Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum terutama diarahkan sebagai penuntut umum dengan berbagai instansi-instansi penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim serta aparat keamanan lainnya dengan jalan melaksanakan penyegaran para Jaksa, penataran gabungan antara aparat Negara penegak hukum serta peningkatan hubungan fungsional Kejaksaan dengan penyidik (POLRI) dan Pengadilan (Hakim).

Penyuluhan hukum dilaksanakan dalam rangka Program Jaksa Masuk Desa (JMD) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran

Tabel / *Table IV - 14*
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH TINGKAT II YANG SUDAH DISYAHKAN
APPROVED LAW PRODUCTS BY DISTRICT

No	Kabupaten Daerah Tingkat II *District*	Awal pelaksanaan tugas *Begginning of duty execution 1978*	Dalam pelaksanaan tugas *IN-service period*			
			1979	1980	1981	1982/1983
1	Lombok Barat *West Lombok*	6	15	8	18	8
2	Lombok Tengah *Central Lombok*	12	8	17	11	2
3	Lombok Timur	13	4	24	15	3
4	Sumbawa	3	10	5	9	8
5	D o m p u	7	4	8	18	2
6	B i m a	9	6	21	9	6
	Jumlah/*Total*	50	45	83	78	27

Recruitment of personnels and improvement of vocational skills and field-work ability of the KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana = Criminal Code) and issuance of directives in the field of administration and the judiciary, expansion as establishment of building/office of the Appelate Court in West Nusa Tenggara and provision of rehicles. In the frame work of effecting equitable opportunity of obtaining justice and legal protection, legal aid has been pioneered for criminal cases for destitute people and aid for legal consultation through Law Faculty of the University of Mataram. Besides, activities are also undertaken for inventory of Court sentences and Legal consultation in cooperation with the press, alim ulama (experts of Islam), RRI, TVRI and Art figures See Table IV – 15.

The aim of law enforcement is to increase legal order and certainty through the promotion of law awareness so that the community understands their right and abligations as well as promotion of mental attitude, ability and integrity of law enforcement institutions.

To achieves that aim, steps and efforts have been executed in law enforcement, covering the promotion of ability of officials, law consultation and intensification of activities.

Tabel / *Table IV - 15*
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PIDANA
FINAL JUDGMENT OF CIVIL AND CRIMINAL CASES

No	Jenis Perkara *Types of Cases*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
I	Perkara Perdata/*Civil Cases*						
	a Gugatan Umum *General Suits*	53	82	89	100	111	
	b Gugatan Perceraian *Divorce Suits*	17	18	23	21	19	
	c Permohonan Umum *General Request*	73	112	137	190	214	
	d Ijin/dispensasi Kawin *Marriage Dispensation*	9	8	8	5	6	
	e Perkara Prodio *Case without cost*	3	2	5	5	1	
II	Perkara Pidana/*Criminal Cases*						
	a Biasa *Ordinary*	17	35	23	20	7	
	b Singkat *Brief*	207	285	216	247	87	
	c Cepat *Speedy*	-	-	-	-	28	
	d Pelanggaran *Transgression*	1.663	2.116	2.704	3.883	2.121	
	Jumlah/*Total I*	115	220	262	330	351	
	Jumlah/*Total II*	1.887	2.436	2.943	3.350	2.233	

The increase of ability to manage the general duties of the office of Public Prosecution as law enforcement officials, is mainly directed as public prosecutor by benefitting coordination and functional coordination among law enforcement authorities such as the police, Public Prosecutor and judge and others by means of executing refresher courses for Public Prosecutors, joint upgradings among Law enforcement state apparatus as well as enhancement of functional relation between Public Prosecutor and investigator (POLRI = Policemen) and the Court (Judge).

Law consultation is carried out in the framework of among others, the Programme of JMD (Jaksa Masuk Desa = Field work of Public Prosecutor

hukum masyarakat di desa-desa, sehingga mereka dapat menyadari dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya.

Kegiatan mengungkapkan tindak pidana diintensifkan dengan memprioritaskan yang diperkirakan dapat menghambat pembangunan antara lain seperti tindak pidana penyelundupan, korupsi dan subversi.

Dalam hubungan ini selama Pelita III telah dapat dilaksanakan penyelesaian sejumlah pelanggaran/kejahatan yang terperinci per tahun. (Lihat Tabel IV-16).

Sikap mental dan ketrampilan serta kemampuan teknis para penegak hukum terus ditingkatkan. Dalam hubungan ini telah dilaksanakan berbagai macam pendidikan antara lain : Pendidikan Keuangan Peralatan, Pendidikan Kepegawaian, Pendidikan Penyegaran Para Jaksa, Pendidikan Bendaharawan.

Juga telah dibangun, diperluas/direhabilitasi prasarana gedung sebanyak 59 buah, pengadaan sarana mobilitas sebanyak 47 buah. Disamping itu telah dididik Pembantu Jaksa dari mahasiswa APDN, dan Polisi Pamong Praja sebanyak 283 orang.

Pembinaan Pemasyarakatan

Tujuan pokok pembinaan pemasyarakatan ialah peningkatan penyempurnaan usaha pembinaan narapidana dan anak didik secara sosial-edukatif sehingga setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup secara wajar. Usaha yang telah dilaksanakan mencakup penambahan tenaga personil, mengadakan usaha kerajinan, pengadaan sarana kerja, pembinaan anak, dan pengadaan sarana diklat.

Penambahan tenaga personil yang memenuhi persyaratan keahlian, sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1982/1983 sebanyak 425 orang. Mengadakan usaha kerajinan/unit produksi antara lain bengkel kerja, pembuatan keset bulu, sapu ijuk dan lain sebagainya.

Pengadaan rumah Dinas sebanyak 6 buah dan sarana mobilitas sebanyak 10 buah yang terdiri dari 1 buah kendaraan roda empat dan 9 buah roda dua.

Pembinaan terhadap anak dilakukan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan melalui penyuluhan Agama, pendidikan Umum, olah raga, asimilasi, cuti PRT (cuti menjelang lepas), pelepasan bersyarat dan lain sebagainya. Sedangkan pengadaan sarana pendidikan/latihan untuk Narapidana mencakup tenaga pengajar dan alat peraga, perpustakaan dan alat-alat olah raga, alat-alat pertukangan dan lain sebagainya. (Lihat Tabel IV-17).

Keimigrasian

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas keimigrasian dan pelayanan kepada masyarakat telah dilaksanakan peningkatan sarana serta kegiatan-kegiatan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum. Antara lain, pembangunan rumah dinas, pembangunan gedung kantor, dan pengadaan kendaraan dinas.

Di dalam rangka usaha pengawasan terhadap orang Asing di Daerah Nusa Tenggara Barat, telah dilaksanakan dan ditingkatkan kerja sama antara Kantor Imigrasi Mataram dengan Instansi-instansi Pemerintah lainnya seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengawasan di lautan, Kantor Imigrasi Mataram duduk sebagai Anggota Ugas Kamla yang dikoordinir oleh Sional Ampenan.

Selanjutnya di dalam rangka pelayanan keimigrasian dalam kaitannya dengan pengembangan kepariwisataan di daerah Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan pula berbagai langkah dan kegiatan. Antara lain perluasan gedung Kantor Imigrasi Mataram khusus untuk ruangan pelayanan terhadap touris-touris; pelayanan cepat untuk touris-touris yang memohon perpanjangan ijin tinggal; dan ceramah tentang pengetahuan tekhnis keimigrasian kepada para Pramuwisata yang telah dilaksanakan dalam kursus Pramuwisata Nusa Tenggara Barat di Mataram tanggal 18 sampai dengan 27 Januari 1983. Lihat Tabel IV-18.

9. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketertiban umum dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan yang antara lain oleh karena adanya pelanggaran hukum, bencana alam yang ditimbulkan oleh manusia serta faktor-faktor ekonomi keuangan.

Didalam usaha menciptakan keadaan wilayah Nusa Tenggara Barat yang tentram dan tertib seperti yang dimaksud dalam pasal 81 Undang-undang No 5 Tahun 1974, telah dikembangkan dan atau dilaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak yang mengenai pembinaan ketertiban umum. Dalam hal ini telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala maupun secara insidentil.

in rural areas) with the aim of increasing law awarenese among the rural community so that they can realize and understand their rights and obligations.

Activities to deal with criminality are intensified, with priority to cases that can hamper the development, such as smugling, corruption, and subversion. See Table IV – 16

Tabel / *Table IV - 16*
PENYELESAIAN PELANGGARAN/KEJAHATAN (BUAH)
SETTLEMENT OF TRANSGREESION/CRIMINALITIES (UNIT)

No	Tindak Pidana *Criminality*	1978	1979	1980	1981	1982/83
1	Jumlah pelanggaran *Number of Transgression*	4.822	5.314	4.297	6.198	4.486
2	Yang sudah diselesaikan *Solved*	4.367	5.071	4.074	8.187	4.471
3	Yang belum diselesaikan *In arrear*	455	233	233	51	15

The mental attitude, vocational skills and field ability of Law enforcement officials are continually increased. Various educations had been executed such as : Logistics, finance, personnel education, refresher courses of Public Prosecutors, treasure etc.

59 units of building had been establised, expanded / rehabilitated and mobility facilities were provided 74 units. Besides, 283 persons of Assistents Public Prosecutor consisting of Police of Pamong Praja and students of APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri = Academy of Public Administration) had been given additional training.

Promotion of the Penitentiary

The main objective of the promotion of the penitentiary is to step up the promotion efforts of the prisoners and persons educated in a social-educative approach so that after they have been released they can naturally live in the community. Efforts have been executed to cover addition of personnels, home industry, supply of work facilities, promotion of children, and provising of education facilities and training.

Addition of personels which meet vocational skill requirements since 1978 up to 1983 numbered 425 persons. Home industry covered production units such as workshop, feather door-mats, brooms-make of palm-fibre and miscellany.

Provision of official house numbered 6 units and mobility facilities numbered 10 units consisting of 1 unit of four-wheel vehicle and 9 units of two-wheel vehicle.

Promotion of children is carried out in prison as well as outside prison through religious consultation, general education, sports, assimilation, PRT holiday (holiday given to persons imprisoned just before they are released), conditional release and miscellany. Meanwhile, provision of facilities of education/training for prisoners covers instructors, demonstration equipments, library, sport-instruments, handicraft-instruments etc. (See Table IV – 17).

Tabel / *Table IV - 17*
JUMLAH NARAPIDANA (orang)
TOTAL PRISONERS (person)

No	Jenis Kelamin *Sex*	1978	1979	1980	1981/82	1982/83
1	Laki-laki/*Male*	121	119	57	95	62
2	Wanita/*Female*	7	7	44	4	4
	Jumlah/*Total*	128	126	101	99	66

Immigration

To promote the implementation of immigration duties and public service, efforts have been done to step up facilities and service of administrative activities of various legal affairs, such as the establishment of official houses, office buildings and provision of official vehicles.

In the effort of foreigners supervision in West Nusa Tenggara, cooperation has been fostered between the Immigration office and other Government authorities such as the Police, Public Prosecutor Office, and so on. For supervision on the sea, the Immigration Office of Mataram takes part as member of Ugas Kamla Task Force (Keamanan Laut = Security of the sea) coordinated by Sional (Sea territory authority) of Ampenan.

Immigration service in relation with the development of tourism in West Nusa Tenggara Region covers various steps and activities, such as expansion of building of Immigration Office of Mataram especially room for tourist service ; speedy service for application of stay-permit, and lectures on immigration for tourist-guides such as given in courses for tourist-guides of West Nusa Tenggara in Mataram on January 18 to 27, 1983 (See Table IV – 18).

Tabel / *Table IV - 18*
PERKEMBANGAN URUSAN KEIMIGRASIAN 1978 - 1982/1983
DEVELOPMENT OF IMMIGRATION AFFAIRS

No	Uraian / *Legend*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	Pemberian Paspor RI / *Passports issued*						
	- Pas por RI / *Passport of the Republic of Indonesia*	540	544	692	1.040	1.761	16
	- Pas por RI Asing / *Passport RI for Foreign*	48	64	83	80	92	5
2	Exit permit	639	646	803	191	2.409	16
3	Exit Reenty Permit	71	93	131	135	113	7
4	Perpanjangan ijin tinggal / *Stay Permit Expansion*						
	- Visa Turis/*Tourist Visa*	248	178	325	363	364	34
	- Visa Kunjungan/*Visit Visa*	55	88	60	38	127	11
	- Visa berdiam sementara / *Temporary Stay Permit*	-	-	-	-	-	-
5	Pemberian ijin tinggal KIM/S / *Temporary Stay Permit Given of KIM/S*	3	23	14	-	1	-
6	Kapal laut yang memerlukan pelayanan Imigrasi / *Ships in need of immigration service :*						
	- Datang/*Arrival*	30	36	27	45	24	2
	- Berangkat/*Departure*	35	38	28	24	19	-

Didalam rapat koordinasi terdapat masing-masing pihak yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan fungsi pembinaan ketertiban umum, melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk kemudian dirumuskan cara-cara pemecahannya.

Disamping itu telah dibentuk tema-tema khusus yang mengenai sesuatu gangguan yang bersifat insidentil. Kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah pembinaan ketertiban umum adalah :

Koordinasi Pemberian Ijin

Didalam hal ijin sesuatu perlombaan dan keramaian umum, belum dapat dikeluarkan sebelum memperoleh pertimbangan dari pihak-pihak instansi yang bersangkutan dengan pelaksanaan pembinaan umum.

Jenis ijin perlombaan dan keramaian umum yang diminta sejak tahun 1979 sampai tahun 1984 adalah perlombaan di jalan raya 3 (tiga) kali, pasar malam 10 kali, dan hiburan 16 kali. Permohonan tersebut setelah dinilai asas manfaatnya secara luas, maka disetujui perlombaan di jalan raya tiga kali, pasar malam 10 kali dan hiburan 16 kali. Dengan demikian dari sejumlah permohonan ijin tidak satupun yang ditolak, oleh karena perlombaan dan keramaian yang dimintakan ijinnya dinilai tidak akan mengganggu ketertiban umum.

Usaha-usaha Pembinaan 8 Tertib

Selanjutnya mengenai pembinaan serta pemeliharaan hal-hal yang berkaitan dengan tertib jalan, tertib taman, tertib tempat umum, tertib keamanan lingkungan, tertib bangunan, tertib penghunian bangunan, tertib gelandangan dan pengemis, dan tertib tuna susila telah dilaksanakan usaha-usaha yang menyeluruh dan terpadu sebagai terurai dibawah ini.

1. Tertib Jalan

Tertib jalan meliputi penyelenggaraan pekan tertib lalu lintas secara berkala : mengadakan sidang kilat/rahasia terhadap pelanggaran lalu lintas secara insidentil; memanfaatkan potensi yang ada dalam menunjang tanda-tanda dan rambu-rambu lalu lintas; memberikan penerangan kepada sopir, pelajar dan kusir dokar; mengadakan beberapa perubahan jalur atau route kendaraan angkutan penumpang umum/bemo, truk angkutan barang, cidomo dan lain-lain sesuai dengan kemajuan dan keramaian kota; dan mengadakan sistem uji coba terhadap angkutan penumpang umum. Disamping itu, memanfaatkan organisasi massa seperti Pepabri dalam pelaksanaan pengatur parkir : secara bertahap membangun tambahan prasarana jalan, pengerasan dan pengaspalan jalan; menetapkan dan membentuk daerah tertib lalu lintas dengan urutan prioritas dan tahapan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing lokasi; penambahan kelengkapan rambu-rambu jalan setiap tahun, dan melarang/memperingatkan dan menindak mereka yang tidak mentaati tertib lalu lintas.

9. Public Order and Security

Public Order is condition where the Government and the people can perform activities safely, orderly and regularly. Public order can be disturbed by various causes and conditions such as legal offences, matural disasters, disturbances caused by man and economic-financial factors.

To create security and order in West Nusa Tenggara as intended in Article 81 of Law No 5 of 1974, coordination with related authorities concerning promotion of the public order have been extended and / executed. In this case coordination meeting has been executed regularly as well as insidentally.

In coordination meeting the parties involved in the promotion of Public order should report achievement of goals and problems confronted in order to formulate the solutations. Besides, special teams have been established to manage incidental disturbances. Acivities that have direct relation with promotion of public order are as follows :

Coordination of Permit Inssuence

A permit of any competition and public festival can not be issued before getting approval from authorities involved in the implementatin of public order promotion.

Permits of competition and public festival requested since 1979 1979 up to 1984 include 3 highway races, 10 fairs, and 16 entertainments. After the applications have been evaluated extensively, the requests of permits for 3 highway faces, 10 fairs and 16 entertainments are approved. Thus, none of the total number of applications is refused, because the competition and public festival are not considered to disturb public order.

Efforts for the Promotion of 8 orders.

The promotion and maintenance of matters relating to traffic order, park order, public place order, security of environment order, building order, building tenants order loafers and beggars order, and prostitutes order,have been Wholly and integrally implemented as detailed below.

1. Traffic Order

Traffic order includes execution of prodical traffic week; ticketing system of the traffic offences; exploit of available potentials in support of traffic marks; provision of information to drivers, students, coachmen of the small two-wheel horse carriage, change of routes of public transport/bemo (three-wheel vehicles), trucks, cidomo and miscellany in accordance with progress and crowding of cities and test system of public transport. Besides, efforts are also undertaken to benefit mass organization such as the Pepabri (Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjatan RI = Association of retired-ABRI Servicemen) in the arangement of parking, development of additional road infrastructures, the paving and asphalting of roads; assigment and establishement of the region of traffic order with priority and phase conforming with situation and conditioning of respective locations; addition of traffic maeks and corrective acts upon those who violate the traffic regulation.

2. Park – Order

Park-order is carried out by regreening. Execution of regreening annually covers acvities of maintenance and arangement of existing trees, supply

2. Tertib Taman

Tertib taman dilakukan dengan jalan penghijauan. Pelaksanaan penghijauan dari tahun ke tahun meliputi kegiatan pemeliharaan dan penataan pohon-pohon yang ada, pengadaan bibit, penyulaman dan penanaman baru serta pemeliharaan tanaman untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar merasa ikut memiliki dan mengerti arti penghijauan. Untuk itu telah diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya memiliki tanaman yang hijau serta segar dan indah.

3. Tertib Tempat Umum

Penertiban tempat umum termasuk keamanan pasar, komplek perdagangan dan terminal. Upaya penertibannya meliputi langkah-langkah membentuk satuan pengaman di wilayah pasar dengan pembiayaan secara swakarsa dari para pedagang yang memanfaatkan pasar tersebut; mengatur penempatan para pedagang dalam pasar untuk mempermudah para konsumen dalam mencari kebutuhannya; mengusahakan kepada para pemilik toko yang berada di pinggir jalan utama, agar menyediakan ruang pejalan kaki ± 2 meter demi keindahan kota, kelancaran serta keamanan lalu lintas; dan pembinaan Hansip dengan cara swakarsa dari pemilik toko/pengusaha yang berada di pinggir-pinggir jalan utama dan memberi fasilitas berupa pengelolaan di parkir di tempat-tempat tertentu.

4. Tertib Keamanan Lingkungan

Untuk tertib keamanan lingkungan telah disediakan alat Pemadam Kebakaran. Sedangkan untuk kelancaran serta berhasilnya pelaksanaan telah diusahakan; mengangkat tenaga honorer, serta membentuk regu-regu sebagai unsur pelaksana; mengadakan pendidikan latihan secara insidentil di dalam rangka peningkatan ketrampilan dan pembinaan fisik para petugas; menjalin kerja sama yang mantap dengan petugas keamanan lainnya; merangsang warga masyarakat dalam pelaksanaan proyek gentengisasi; dan penekanan pada pengecer minyak untuk mengadakan/menyediakan alat-alat pemadam api sebagai salah satu syarat untuk dapat diberikan ijin.

5. Tertib Bangunan

Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mewujudkan tertib bangunan mencakup pengawasan yang ketat pada zone-zone yang terlarang untuk membangun rumah terutama lokasi yang disediakan untuk perkantoran, industri, pusat pendidikan dan jalur hijau. Dalam rangka pengendalian pusat-pusat wilayah daerah-daerah pemukiman baru, selalu diadakan koordinasi untuk penentuan kebijaksanaan pemberian ijin bangunan sehingga dapat disesuaikan pada saat penyusunan detail plannya.

Kepala-kepala Desa diberi bimbingan/bantuan teknik dalam penertiban dan pengaturan tata kampung di wilayah, terutama kampung yang kurang baik ditinjau dari sudut bangunannya. Untuk pengontrolan ijin bangunan, Lurah-lurah yang bersangkutan diminta untuk turut berpartisipasi. Sementara itu, untuk pengamanan tanah tag-tagan sesuai dengan fungsinya (dikembalikan dalam keadaan semula), dibentuk team pembongkaran bangunan-bangunan diatas tanah tag-tagan.

Usaha lainnya yang telah dilakukan meliputi pemberian penjelasan kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan Master Plan Kota dan peraturan daerah tentang ijin bangunan. Camat dan Kepala-kepala Desa/Lurah diinstruksikan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat berkala sebagai pedoman dalam pengawasan terhadap bangunan-bangunan di wilayahnya.

Disamping itu, ditingkatkan pelayanan kepada instansi dan masyarakat dalam mengurus ijin lokasi dan ijin bangunan dengan jalan: menyediakan peta rencana induk; memberikan penjelasan-penjelasan apabila diperlukan; mempermudah prosedure dan mempercepat penyelesaian ijin; mempercepat penyusunan/penyelesaian detail-detail plan yang dilaksanakan untuk zone-zone yang pertumbuhannya terlihat sangat cepat seperti daerah perdagangan; dan khusus untuk perencanaan dan pelaksanaan perbaikan kampung di dalam Kota, telah disiapkan lokasi-lokasi sasaran proyek KIPP.

6. Tertib Penghunian Bangunan

Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk dapat tercipta dan terpeliharanya tertib penghunian bangunan meliputi bangunan Pemerintah.

Untuk dapat menjadi penghuni bangunan/perumahan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mengajukan permohonan ini, maka dibuat suatu daftar kriteria dari pemohon yang bersangkutan oleh panitia yang khusus dibentuk untuk menilai dan meneliti dalam rangka penunjuk-

seedplants, replacement of dead plants, planting of new trees, and maintenance of plants to arouse public awareness in order to cultivate a sense of belonging and to understand the importance of regreening. For that reason, instruction are given to the community concerning the importance of having green, fresh and beautiful plants.

3. Public Place Order.

Order in public places includes the security of markets, shopping centres and terminals. Efforts of putting order cover the formation of security units in markets areas with self-help expense of the merchants in the market; placement of the merchants in the market to make consumers easier in looking for their needs; encouragement to shopkeepers located in main roads to provide pavement ± 2 meters for the sake of urban order and smooth flow and security of traffic; and self-help keepers / businessman located by the side of main roads and arrangement of parking in certain places.

4. Environment Security Order.

Fire extinguishers are provided for the security, while for the acceleration of performance part-timers and security units are employed. Besides, efforts have been undertaken for incidental education and training for the increase of vocational skills and phisical promotion of the officials ; cooperation with other security units, motivating the community in the execution of tile-roof project; and emphasizing oil retailers to provide fire extinguishers as one of the requirements to get operational permit.

5. Building Order.

Efforts have been carried out to realize building order covering tight supervision of prohibited zones for the establishment of building, mainly locations provided for offices, industries, education centre, coordination is always made to decide the policy of building licence so that it may confrom with the detailed plan.

Heads of villages are provided with directives/technical aid in spatial management and order of villages, mainly disorderly villages in regard building establishment. To control licence of building, Heads of Kelurahan (Lowest administrative unit inurban area) area requested to participate, Meanwhile, for the security of tag-tagan land in accordance with the function (return to formerly condition), a team of demolition of buildings on tag-tagan land is established.

Other efforts are executed to cover information to the community concerning regulations of city Master Plan Regional regulations concerning licence of building. Heads Of Sub districts and Heads of Villages/Lurah (Heads of Kelurahans) are given oral as well as written instructions through periodeicmeetings as guidelines in the supervision of their regional buildings.

Besides, services to the authorities and the community are stepped up in undertaking location Licence and building licence by means of : providing map of master plan : giving explanantion when needed enhancing procedures and speedy issuence of licence; speedy drafting / issuance of detaile plan executed for speedy growth of zones such as trade centres ; and especially for planning and performing of kampung rehabilitation in urban areas, the KIPP project location have been drawn.

6. Building Tenant Order.

Steps which have been executed to create and maintain building tenant order cover Government buildings. To become tenant of building/housing established by the Regional Government, there some conditions that have to be fulfilled. Firstly, submit application, and then a committee will make a list of applicants concerned. The committee is especially established to evaluate and investigate in the framework of appointment of house in accordance with the criteria proposed by the committee.

Appointment Committee decides the persons who will receive the letter of licence of tenancy in certain buildings / houses. Based on the result of the stated committee, the Bureau of Logistics and Maintenance makes a letter of licence of building tenancy for the apointed persons as determined in the SIP (Surat Izin Penghunian = Letter of Licence of Tenancy).

Appointment to inhabit a building (house) by a civil Servant is vlid only during the Civil Servant service-term for the state of Region. If the Civil Servant is no longer in service (for the State / Region), retired or removed to another region (thus leaving the Region Government house mentioned), he has to previoresly inform the Governor of West Nusa Tenggara cg. Head of Burean of Logistics and Maintenance.

IF the inhabitant of a building (house) dies the inheritors should hand over the house and its hey to the Regional Government. The inhabitant is not permitted to pass on to someone else, or to rent it to a third party to occupy the said house.

The inhabitant is not permitted to add/to cut down/to chauge the house of the Regional government in all manifestations with out prior consent of the Regional government. All or part of the house of the Regional government

kan rumah sesuai dengan kriteria yang diajukan. Panitia Penunjukkan perumahan inilah yang menentukan siapa di antara pemohon yang dapat diberikan surat ijin penghunian bangunan yang telah ditentukan. Atas dasar hasil penentuan dari panitia tersebut, Biro Perlengkapan dan Perawatan membuat surat ijin penghunian bangunan kepada yang diberi hak untuk menempati dan ditunjuk dalam SIP (Surat Ijin Penghuni).

Penunjukkan/mendiami bangunan (rumah) oleh seorang Pegawai Negeri, hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugas untuk Negara atau untuk Daerah. Bilamana Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menjalankan tugas (untuk Negara/Daerah), dipensiunkan atau pindah ke daerah lain (akan meninggalkan rumah Pemerintah Daerah tersebut), harus memberitahukan sebelumnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Cq Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan.

Apabila penghuni bangunan (rumah) meninggal dunia, maka akhli warisnya menyerahkan kembali rumah tersebut beserta kuncinya kepada Pemerintah Daerah. Penghuni tidak diijinkan/tidak diperbolehkan menunjuk/mengalihkan nama, menyewakan lagi kepada pihak ketiga, untuk menempati rumah tersebut.

Penghuni tidak boleh menambah/mengurangi/merubah bangunan rumah Pemerintah Daerah daerah tersebut dengan sifat bagaimanapun juga tanpa diberi ijin terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah. Seluruh atau sebagian dari rumah Pemerintah Daerah oleh penghuninya tidak boleh dipergunakan lain dari pada yang telah ditentukan.

Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya rumah Pemerintah Daerah serta semua biaya yang dikeluarkan untuk memeliharanya dibebankan pada penghuni yang bersangkutan, kecuali rumah jabatan/ rumah golongan I yang telah disediakan anggaran pemeliharaannya pada instansi/Unit Daerah yang mengelola rumah jabatan. Penghuni bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian penghuni sendiri sehingga menimbulkan kerugian terhadap rumah Pemerintah Daerah tersebut.

Jika penghuni bangunan tidak mengindahkan atau mengabaikan ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, maka ijin yang telah diberikan kepada penghuni dapat ditinjau kembali. Surat ijin penghuni berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penerbitannya dan dapat diperbaharui kembali.

7. Tertib Gelandangan dan Pengemis

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis adalah mengarah pada beberapa alternatif. Umumnya dipulangkan kembali ke daerah asalnya. Selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1980/1983 telah berlangsung 6 kali, sejumlah 102 jiwa. Dari jumlah ini sebagian besar mereka yang dikembalikan ke daerah asalnya adalah berasal dari Kabupaten Lombok Tengah.

Alternatif lain adalah dimukimkan pada pemukiman lokal. Pemukiman lokal merupakan suatu bentuk pelayanan kepada gelandangan dan pengemis pada lokasi daerah pertanian dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan disertai bantuan berupa perumahan, makanan dan pemberian tanah pertanian serta bibit tanaman. Dalam hal ini mereka diberi latihan terlebih dahulu berupa bimbingan mental, sosial dan ketrampilan kerja. Penempatan gelandangan dan pengemis di lokasi pemukiman lokal Kecamatan Bayan selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 telah berlangsung 2 (dua) kali dengan sasaran sejumlah 426 jiwa.

Pelayanan Sistem Swakarsa merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis dialamatkan tempat tinggal atau desa asalnya yang disertai dengan bantuan perumahan, makanan dan modal usaha untuk mengembangkan ketrampilan mereka. Untuk ini mereka telah dibekali/dipersiapkan melalui kegiatan/latihan/bimbingan mental, sosial dan ketrampilan kerja pada sarana rehabilitasi pengemis.

Pelayanan sistem swakarsa selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 telah dilakukan tindakan penertiban sebanyak 4 (empat) kali. Sedangkan untuk tahun 1983/1984 diadakan 2 (dua) kali dengan sasaran sejumlah 464 jiwa, yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat serta Kabupaten Bima sejumlah 187 jiwa.

Yang terkena penertiban ada pula yang ditransmigrasikan ke luar Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan transmigrasi bagi para gelandangan dan pengemis dilakukan bekerjasama dengan pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ditransmigrasikan, sebanyak 11 KK.

can be used for any purpose other than the previous assignation.

The inhabitant has to take care of the Regional Government house as best as possible and all maintenance expanses is charged to inhabitant concerned, except official house / house of group I where the maintenance expense is provided by the autharity / Regional Management Unit of official house. Inhabitant is responsible for all expense to repair damaged as result of mistake ornegligence of inhabitant causing disadvantage towards the Regional Government house.

If inhabitant ignores or does not pay attention to the regulation on obligations that have to be fulfilled, the licence given to the inhabitant can be revoked. Licence of tenancy is valid for 3 years since the date of issuance and can be renewed.

7. Loafers and beggars Order.

Activities executed to overcome the problems of loafers and beggars are directed to some alternatives. Generally they are returned to their respective places of origin. During the period of 1978/1979 up to 1980/1983 this operation had lasted 6 times, coverning 102 persons. Of the total number most of them originated from the Districts of Central Lombok.

Another alternative is to settle them in local settlement. Local settlement is a form of service to loafers and beggars is agricultural location in West Nusa Tenggara Province accompanied by aid of housing, food, agricultural land, and seeds. In this case they were previously trainied in mental aptituted, social guidance and vocational skills. Placement of loafers and beggars in local settlement in Bayan Bub District during the period of 1978/1979 up to 1982/1983 had numbered 2 times with the target of 426 persons.

The system of self-help service is a form of service given to loafers and beggars returned to original villages accompanied by aid of housing, food and capital to develop their vocational skills. They have been prepared through activities/training/guidance of mental aptitude social and vocational skills at rehabilitation facilities of beggars.

The system of self-help service during the period of 1978/79 up to 1982/83 had been executed 4 times. While in 1983/84 it had been executed 2 times with the target numbered 464 persons, located in the District of Bima numbered 187 persons.

There were among of them transmigrated to outside West Nusa Tenggara. The implementation of transmigration of loafers and beggars was performed in cooperation with the Regional office of the Directorate General of Transmigration, West Nusa Tenggara Province.

During the period of 1978/79 up to 1982/83 was only 11 families were transmigrated.

Some of the loafers and beggars are accomodated in a temporary receiving station. The temporary receiving station of loafers and beggars is executed through the Wisma Marga Karya Cemara, Mataram, and Wisma Marga Karya Pandansalas, Cakranegara, with accomodation capacity of 100 persons. During the period of 1978/79 up to 1982/83 it had been executed for 12 times.

Guidance and Consultation

Guidance and consultation towards loavers and beggars in the locations/loafers huts hold the objectives of :

- *making them aware inorder to come back to reasonable living in accordance with human dignity :*
- *giving consultation and explanation to them in order to be aware and be ready to accupy houses of receiving station :*
- *giving consultation to them in order to be prepared to be transmigrated.*

8. Prostitutes Order

Activities executed in the framework of overcoming controlling the prostitutes have various alternatives which have many similarities with controlling loavers and beggars, such as : returned to places of origin During the periode of 1978/79 up to 1979/80 it had lasted 14 times with the target of 85 prostitutes.

The target of on-the-spot consultation include prostitutes. germo (women agency) as well as men who play role as gedaan (body-guard).

This consultation is intended to creating security and order, directing the prostitutes to be officially married to her gedaan ; and suggesting th eprostitutes to spend their income economicially so that a part the money gained could be saved, to be later used at the time they come back to live in lines with moral norms.

Consultation to prostitutes during the period of 1978/79 up to 1982/83 had been executed totally 66 times. Another streamlining effort is to give and injection and health check-up to prevent contagious venercal disease. This activity of giving injection is executed at least once a week and some times laboratory examination is executed.

Sebagian dari yang terkena penertiban dimasukkan pada rumah penampungan sementara. Penampungan sementara para gelandangan dan pengemis dilakukan melalui Wisma Marga Karya Cemara Mataram dan Wisma Marga Karya Pandansalas Cakranegara dengan kapasitas tampung sejumlah 100 jiwa. Selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 telah dilakukan penertiban sebanyak 12 kali.

Memberi bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan terhadap gelandangan dan pengemis pada lokasi-lokasi/gubuk gelandangan dengan maksud :

- Untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- Memberikan penyuluhan dan penjelasan agar mereka sadar dan mau menempati rumah-rumah penampungan sementara yang telah diselesaikan.
- Memberi penyuluhan agar mau ditransmigrasikan.

8. Tertib Tuna Susila

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi/penertiban terhadap wanita tuna susila mempunyai berbagai alternatif yang banyak kesamaan dengan penertiban gelandangan dan pengemis antara lain : dipulangkan ke daerah lain. Selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 telah berlangsung 14 kali dengan sasaran 85 orang wanita tuna susila.

Penyuluhan pada lokasi-lokasi pelacuran sasarannya baik terhadap wanita tuna susila, germo maupun laki-laki yang berperan sebagai pendamping (gendaan). Penyuluhan ini dimaksudkan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban; mengarahkan agar wanita tuna susila dapat mengadakan perkawinan sah dengan laki-laki pendampingnya (gendaan); dan menganjurkan wanita tuna susila untuk menggunakan penghasilannya sehemat-hematnya sehingga sebahagian disisihkan sebagai tabungan, yang nantinya dapat dipergunakan pada saat-saat mereka sudah kembali ke jalan yang sesuai dengan norma-norma susila.

Penyuluhan di lokasi pelacuran selama periode 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 telah dilaksanakan sebanyak 66 kali.

Upaya penertiban lainnya adalah penyuntikan dan pemeriksaan kesehatan yang dimaksud untuk mencegah menularnya penyakit kelamin. Kegiatan penyuntikan ini minimal dilakukan satu kali seminggu dan pada waktu-waktu tertentu dilakukan pemeriksaan di laboratorium.

Disamping itu, latihan pada sasana rehabilitasi wanita "Budi Rini" merupakan wadah pelayanan/rehabilitasi bagi wanita tuna susila dengan memberi bimbingan mental, sosial dan ketrampilan kerja. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sasana rehabilitasi wanita antara lain : pakaian kerja, makanan dan penampungan selama lebih kurang 6 bulan. Latihan pada sasana rehabilitasi wanita "Budi Rini" mulai dilaksanakan pada tahun-tahun 1982/1983 dengan penyantun sejumlah 30 orang untuk satu angkatan. (Lihat Tabel IV-19).

Jenis dan Tingkat Kriminalitas

Kriminalitas yang terjadi dalam periode 1978/1979 saja sebanyak 20.342 tindakan kriminil yang terdiri dari :

- Pencurian 1.246
- Pembunuhan 175
- Penganiayaan ....:.. 223
- Pelanggaran 18.603
- Kenakalan Remaja 95

Keseluruhan tindakan kriminalitas di atas dapat terungkap dengan tuntas sehingga dapat mempercepat proses peradilan. Lihat Tabel IV-20.

Suatu jenis kriminalitas yang diakibatkan oleh adanya tindakan main hakim sendiri baik yang dilakukan perorangan maupun secara berkelompok, masih terjadi di beberapa Kabupaten, walaupun intensitas kejadiannya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kasus kriminalitas lainnya. Sebab-sebab terjadinya kasus tersebut, kadang-kadang sangat sepele/ringan, seperti masalah perkelahian anak-anak, masalah warisan dan lain-lain kejadian yang sebenarnya menurut logika tidak pantas sampai menimbulkan korban jiwa ataupun mengikutsertakan kelompok masing-masing. Kelompok-kelompok yang perkelahian tidak hanya terbatas antar suku dan agama tetapi antar kampung yang mempunyai suku dan agama yang sama.

Walaupun jumlah kejadian ini relatif kecil, namun karena kadang-kadang melibatkan massa yang besar, timbul kerawanan. Sebagai gambaran, jumlah perkelahian perorangan ataupun yang melibatkan massa ialah bahwa selama lima tahun terakhir telah terjadi 23 kasus yang semuanya telah diselesaikan dengan tuntas.

Besides, training at women rehabilitation centre "Budi Rini" is a service/rehabilitation agency for prestitutes by giving mental and social guidance and vocational skills. Facilities provided by the women rehabilitation centre daily uniform, food, and shelter for 6 months. Training at "Budi Rini" rehabilitation centre started to be executed in 1982/83 with aid for 30 persons for one group (See Table IV – 19)

Tabel / *Table IV - 19*
TINDAKAN USAHA-USAHA PENERTIBAN
TREATMENT OF CONTROL

No	Uraian *Legend*	Usaha-usaha Penertiban *Treatment of Control* 1978 *1978*	1979 *1979*	1980 *1980*	1981 *1981*	1982 *1982*	Keterangan *Explanation*
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perusahaan industri *Industrial Enterprises*	-	496	551	660	-	
2	Pedagang/*Merchants*	-	82	44	69	1.034	
3	Bangunan liar/*Illegal Building*	-	126	167	196	245	
4	Pengemis/*Beggars*	603	3.083	2.008	2.022	1.348	
5	Gelandangan/*Loafers*	851	3.410	2.936	2.928	695	
6	W T S/*Prostitutes*	284	371	386	514	315	
7	Sengketa rumah/*House Disputes*	-	-	-	-	-	
8	Sengketa tanah/*Land disputes*	-	-	-	-	-	

Types and Prate of Criminality

Criminalities during the period of 1978/79 numbered by 20,342, consisting of :

- *Pencurian / Theft* 1,246
- *Pembunuhan / Murder* 175
- *Penganiayaan / Ill treatment* 223
- *Pelanggaran / Transgression* 18,603
- *Kenakalan Remaja / Juvenile Delinquency* 95

Alla criminalities mentioned above could be uncovared, thus speeding up court proceedings. (See Table IV – 20)

Tabel / *Table IV - 20*
PERKEMBANGAN DAN JENIS KRIMINALITAS
DEVELOPMENT AND TYPES OF CRIMINALITIES

No	Peristiwa *Event*	1978	1979	1980	1981	1982	Jumlah *Total*
1	Pencurian/*Theft*	195	314	277	259	201	1.246
2	Pembunuhan/*Murder*	48	48	30	25	24	175
3	Penganiayaan/*Ill Treatment*	40	40	19	68	56	223
4	Pelanggaran lalu lintas/*Traffic Offences*	3.116	2.883	3.162	4.755	44.688	18.603
5	Kenakalan remaja/*Juvenile Delinquency*	2	14	32	33	14	95
	Jumlah/*Total*	3.401	3.299	3.520	5.140	4.982	20.342

Arbitrary act criminality by individuals as well as groups stil happened in some districts, although the intensity was small-scale when compared with those of other criminalities. The cases someties caused by light problems such as children quarrel, inheritance and other incidents which need not have sacrifice souls or involved groups. The quarrel did not only limit to inter tribes and religious homogeneity.

Although the number of events as relatively small scale, sometimes it involved a big number of people, creating a critical stituation. As an Illustration, the number individuall quarrels or mass quarrels during the last 5 years totalled 23 cased and they all had been settled thoroughly.

10. Information, the press and Social Communication.

Activities of information are generally directed to equitable distribtion of information down villages level through all mass communition media and means as follows :

a. ***Seminar and exhibition*** *as public political education mechanism. In this case the PUSPENMAS (Pusat Penerangan Masyarakat = Public Information Centre) as forum of Public political education contribute substially. The 6 districts in West Nusa Tenggara have owned PUSPENMAS.*

10. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Kegiatan penerangan secara umum diarahkan untuk pemerataan informasi sampai ke desa-desa melalui segenap media komunikasi massa dan jalur-jalur seperti :

a. Sarasehan dan pameran sebagai mekanisme pendidikan politik masyarakat. Dalam hubungan ini Pusat-pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS) sebagai sarana forum pendidikan politik masyarakat sangat membantu. Keenam kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Pusat Penerangan masyarakat yang diantaranya dibangun pada tahun 1981/1982 adalah Pusat Penerangan Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Pusat Penerangan masyarakat pada Kabupaten lainnya dibangun dalam Pelita II.

b. Surat Kabar untuk Desa.
Bagi para Pamong Desa dan pemimpin sosial desa diadakan kegiatan Surat Kabar untuk Desa, penyerahan Televisi dan Radio. Berhasil disebarkan surat kabar ke desa-desa seluruh Kabupaten sebanyak 200 lembar setiap harinya.

c. Untuk melaksanakan sistem penerangan terpadu telah dibentuk forum koordinasi kehumasan Pemerintah dalam Badan Koordinasi Kehumasan antar Departemen untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sistem penerangan terpadu ini berusaha agar pemerataan informasi dari Pemerintah ke desa diterima dalam arti yang sama.

d. Peningkatan kegiatan pertunjukan rakyat yang bukan saja merupakan khasanah budaya bangsa/kesenian tradisional yang khas bagi berbagai daerah tetapi merupakan pula media komunikasi mendatar dan komunikasi keatas yang efektif. Melalui pertunjukan rakyat, komunikasi timbal balik dan komunikasi sosial antara pemerintah dan rakyat bertambah dan pembangunan lebih dapat mencerminkan dan kebutuhan nyata masyarakat. Selama periode 1979 sampai dengan tahun 1983 saja telah diadakan 3 (tiga) kali Festival Kesenian Daerah dan 60 kali pertunjukan-pertunjukan rakyat yang dimaksud sebagai bahan penerangan.

Radio Televisi dan Film

Untuk memperluas informasi Pemerintah sampai ke desa-desa, sampai Pelita II daya pancar RRI Mataram telah diperluas dengan kekuatan 10 KW. Sementara itu fasilitas studio terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Beberapa buah radio Pemerintah Daerah di Pulau Lombok dan di seluruh Kabupaten di Pulau Sumba sangat membantu untuk sarana komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Jumlah radio Pemerintah Daerah ini adalah 4 buah, semuanya dalam keadaan berjalan baik.

Radio-radio swasta niaga yang diawal tahun 1966 s/d 1972 tumbuh bagai cendawan di musim hujan, kesemuanya tahun 1973 telah tidak di udara lagi. Dengan adanya usaha untuk memperbaiki organisasi dan pemancar, maka pada awal tahun 1978 telah muncul lagi beberapa radio swasta niaga.

Daya beli masyarakat yang semakin tinggi telah meningkatkan pemilikan radio oleh masyarakat.

Diawal tahun 1978 dengan lahirnya Satelit Komunikasi Domestik Palapa dan dibangunnya dengan jaringan Televisi di Nusa Tenggara Barat dengan pemancar di Aik Bukaq, komunikasi dengan televisi telah dapat menyentuh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Daerah yang dapat diliputi oleh siaran televisi yaitu sebagian besar pulau Lombok kecuali daerah Lombok Utara, bagian Barat Kabupaten Sumbawa. Disamping itu dengan adanya pemancar TV di Kintamani, masyarakat Lombok Utara telah dapat menerima siaran Televisi dari Bali dan juga dapat ditangkap oleh masyarakat di Lombok Bagian Barat.

Dalam Pelita III secara bertahap telah direhabilitasi pemancar radio yang ada sehingga sekarang telah mempunyai kekuatan 16,1 kilo watt. Disamping itu telah dibangun gedung studio yang lengkap dengan peralatannya. Dengan demikian lengkapnya prasarana tersebut maka usaha-usaha peningkatan mutu siaran, baik isi maupun teknik penyajian, makin dikembangkan sesuai dengan laju pembangunan.

Kelompok pendengar siaran pedesaan setiap tahun makin meningkat dan jumlah jam siaran per hari selama 45 menit. Selanjutnya siaran radio per hari adalah meliputi siaran : berita penerangan, pendidikan dan agama, kebudayaan dan hiburan serta iklan dan sebagainya. Makin meningkatnya mutu siaran mempengaruhi juga jumlah radio yang dimiliki masyarakat.

Jumlah jam siaran bertambah. Pada awal pelaksanaan tugas (1978) jumlah siaran adalah 5.940 menit; pada tahun 1983 jumlah tersebut telah meningkat menjadi 7.000 menit. Bertambahnya jumlah jam siaran tersebut menyebabkan bertambah pula persentase jam siaran untuk berita penerangan, pendidikan/agama, kebudayaan/hiburan dan lain-lain acara yang dikelola. Demikian pula jumlah kelompok pendengar

PUSPENMAS in the district of West Lombok had bee established in 1981/1982, while PUSPENMAS in other districts had been established in Pelita II.

*b. **Rural Newspapers.***
Pamong Desa (Village leaders) and village informal leaders are provided with Rural Newspapers, Television and Radio. 200 copies of newspapers are daily distributed throughout the villages in the districts.

c. To execute an integrated system of information, Governement Inter-Departmental Public Relations coordination fora have been established in provincial and district levels. This integrated system of information attempts to equitably distribute information from the government to villages in the some meaning.

d. Thed activities of traditional show are not only enhancing cultural riches of the nation/specific traditional arts for various regions, but also effective horizontal and vertical communications. Through traditional show, a two way communications and social communication between the government and the people is promoted and the development may better reflect the real needs of the community. During the period of 1979 up to 1983, there were 3 times of regional art festivals and 60 times of public shows intended as materials of information.

Radio, Television and Film

To expand Goverment information up to rural ares in Pelita II the transmission capacity of RRI of RRI in Mataram had been stepped up to 10 KW. Meanwhile studio facilities are continually increased from year-to-year. Some Regional Government Radio Studios in Lombok Island and in all districts in Sumbawa Island facilitate communication between the government and the people. The Regional Government Radios number 4 units, all running well.

The commercial private radio stations hich in the beginning of 1966 up to 1972 grew like mushroom in the rainy season, in 1973 were no longer on air. By attempts to improve organization and transmission, at the beginning of 1978 some private commercial radios had reappeared.

The high rate of public purchasing capacity has increased the number of radio receiving sets owned by the community. At the beginning of 1978, with the introduction of the Palapa Domestic satelite communication System and the establishment of television network in West Nusa Tenggara with the transmission in Aik Bukaq, communication by television has covered the whole community in West Nusa Tenggara. The areas that could be covered by television broadcast include most of Lombok Island expect North Lombok region, and West part of Sumbawa District. Besides, by the existence of TV transmission on in Kintamani, the people in North Lombok and West Lombok have been able to receive TV broadcast from Bali.

During Pelita III the existing radio transmission had gradually been rehabilitated to reach a capacity of 16.1 Kilowatt. Besides, studio building provided with equipments had been built. With the improvement of infrastructures, the efforts to promote broadcast quality, contens as well as presentation technique have been increase singly developed in accordance with the growt of development.

The number of rural broadcast listeners groups increase every year and the broadcast hours totals 45 minutes per day. Daily radio bradcast covers: information news, education and religion, culture and entertainment and advertisments and miscellany. The improvement of broadcast quality also influences the number of radio sets owned by the community.

The number of broadcast hours increase. In 1978 the number of broadcas hours were 5,940 minutes; in 1983 it increased to 7,000 minutes. The addition of broadcast hours caused the increase of percantage of broadcast hours for information news, education / religion, culture / entertainment and other programmes. Likewise, the number rum 1 broadcast listeners groups also goes up. In 1978, the group of radio listeners number 957. It increased to 1,186 in 1982, In 1983 it became 1,226. Besides, ownership of radio sets increased. In 1978 increased to 246,000 units in 1982 and 341 units in 1983 (See Table IV–21).

The number of TV Sets at the opening of broadcast for "East Nusa Tenggara were 2,500 units, which developed fast every year. At the end of Pelita II, the number of Television owned by the community were estimatd at 7,500 units. The increas was due to the opening of a relay station by the Minister of Defence in Bima in 1979. To expand communication, had distributed public TV Sets to villages in West Nusa Tenggara, especially which had been reached by electricity. A part of the public television sets for the villages which had not been reached by electricity was provided with generators.

During Pelita III three units of transmission stations located in the District of Bima, Sumbawa and Dompu had been established. The capacity of the respective transmission stations is as follows: for sumbawa Station 2 x 100 watt, Bima transmission station 1 x 100 watt and Dompu transmission station 2 x 100 watt, while the transmission station located in Lombok Island was established in Pelita II. The coverage area of the transmission station was ± 60 km^2.

siaran pedesaan. Pada awal pelaksanaan tugas (1978) jumlah kelompok pendengar 957. Jumlah ini telah meningkat menjadi 1.186 kelompok pendengar pada tahun 1982. Pada tahun 1983 jumlah kelompok pendengar 1.226. Disamping itu pemilikan radio turut meningkat. Pada awal pelaksanaan tugas (1978) jumlah pesawat-pesawat penerima radio 152.055 buah. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 1982 menjadi 246.000 buah dan pada tahun 1983 telah menjadi 341.000 buah. Lihat Tabel IV-21.

Jumlah pemilikan pesawat televisi pada awal tahun dibukanya siaran untuk Nusa Tenggara Barat sejumlah 2.500 buah yang setiap tahun berkembang dengan pesat. Akhir Pelita II diperkirakan pemilikan pesawat televisi oleh masyarakat 7.500 buah karena dibangunnya pula pemancar relay oleh Menhankam di Bima pada tahun 1979. Untuk memperluas komunikasi, Pemerintah di dalam hal ini Departemen Penerangan telah menyebarkan pula televisi umum ke desa-desa di Nusa Tenggara Barat, khususnya yang telah terjangkau oleh aliran listrik. Sebagian Televisi Umum untuk desa-desa yang belum ada aliran listriknya dilengkapi pula dengan generator.

Dalam Pelita III telah dilaksanakan pembangunan 3 (tiga) buah pemancar yang terletak di Kabupaten Bima, Sumbawa dan Dompu. Kabupaten masing-masing pemancar tersebut, untuk stasiun Sumbawa 2 x 100 watt, stasiun pemancar Bima 1 x 100 watt dan stasiun pemancar Dompu 2 x 100 watt. Sedangkan stasiun pemancar yang terletak di Pulau Lombok dibangun dalam Pelita II. Luas daerah yang dapat dijangkau oleh stasiun pemancar tersebut ± 60 km². Dengan adanya stasiun-stasiun pemancar tersebut, jumlah televisi yang dimiliki oleh masyarakat dewasa ini semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang disiarkan melalui Televisi. Lihat Tabel IV-22.

Film dan bioskop juga tidak kecil artinya sebagai media komunikasi walaupun lebih besar perhatiannya pada tujuan hiburan. Jumlah film yang diputar dan bioskop terus berkembang. Sampai dengan akhir tahun 1979 jumlah gedung bioskop di Nusa Tenggara Barat 25 buah dengan perincian untuk masing-masing kabupaten sebagai berikut :

Lombok Barat 6 buah; Lombok Tengah 2 buah; Lombok Timur 3 buah; Sumbawa 6 buah; Dompu 3 buah; dan Bima 5 buah.

Dalam Pelita III peredaran film menunjukkan peningkatan dengan semakin banyak diputar film nasional maupun film impor di gedung-gedung bioskop yang tersebar pada 6 Kabupaten se Nusa Tenggara Barat. Sampai dengan tahun 1982/1983 jumlah film yang telah diputar sebanyak 10.783 dengan perincian 4.088 buah film nasional dan film impor sebanyak 6.695. Jumlah tersebut sampai dengan bulan Agustus tahun 1983/1984 telah meningkat menjadi 11.141 buah dengan perincian, 4.200 buah film nasional dan 6.942 film impor.

Perkembangan Surat Kabar di Nusa Tenggara Barat

Sampai masa awal Pemerintahan Orde Baru media cetak sangat sulit sekali tumbuh dengan baik di Nusa Tenggara Barat. Walaupun usaha penerbitan surat kabar harian, mingguan, bulanan telah lama diusahakan masyarakat. Sebelum Pelita I di Nusa Tenggara Barat telah terbit surat kabar Gelora yang terbit 3 x seminggu dengan format folio 4 halaman. Penerbit tersebut bertahan sampai dengan tahun 1974 dengan oplah sekitar 1.000 eksemplar setiap terbit.

Usaha penerbitan suratkabar sementara telah dilakukan oleh beberapa penerbitan antara lain Buletin Lantas, yang diterbitkan oleh polisi lalu lintas Komdak Nusa Tenggara Barat, Bhakti ABRI yang merupakan media pembawa suara ABRI seperti harian AB, dan terakhir "Mataram Pos" yang muncul hanya beberapa bulan menjelang Pemilu 1977 dengan oplah 3.000 eksemplar setiap hari.

Media suratkabar (cetak) tidak dapat berkembang dengan baik di Nusa Tenggara Barat, dikarenakan sarana percetakan yang memadai dan melayani dengan cepat belum ada, daya beli dan kegemaran membawa masyarakat yang masih lemah sehingga setiap penerbitan oplahnya tidak dapat berkembang dengan baik.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya lebih suka berlangganan suratkabar dari luar daerah atau SK yang terbit di Jakarta. Dengan demikian majunya transportasi, suratkabar Jakarta dapat diterima di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok pada hari yang sama atau hari yang berikutnya.

Penerbitan Pemerintah yaitu penerbitan melalui instansi-instansi Pemerintah di daerah, baik tingkat Propinsi atau Kabupaten yang lebih dikenal dengan Penerbitan Khusus, sesekali ikut memberikan informasi kepada masyarakat. Oplahnya rata-rata kecil dan berkisar antara 250 s/d 500 eks stensil. Penyebarannya dilakukan untuk pejabat-pejabat Pemerintahan dan petugas-petugas masing-masing instansi.

Tabel / *Table IV — 21*

PERKEMBANGAN JUMLAH RADIO DI NUSA TENGGARA BARAT DIPERINCI PER KABUPATEN

NUMBER OF RADIO SETS IN WEST NUSA TENGGARA BY DISTRICT

	Kabupaten *District*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Lombok Barat *West Lombok*	50.555	60.000	75.000	80.000	100.000	130.000
2	Lombok Tengah *Central Lombok*	16.500	18.500	20.000	23.000	24.000	36.000
3	Lombok Timur *East Lombok*	30.000	32.000	33.000	35.000	40.000	57.000
4	Sumbawa	25.000	22.000	25.110	30.000	34.000	41.000
5	D o m p u	14.000	15.000	20.000	22.000	23.000	32.000
6	B i m a	16.000	21.000	22.000	24.000	25.000	45.000
	Jumlah/*Total*	152.055	168.000	195.110	214.000	246.000	341.000

By the existence of the transmission stations, the number of television sets owned by the communicty continuallay increased, so that community could enjoy the development gains broadcast by television. (See Table IV – 22).

Tabel / *Table IV - 22*

PENYEBARAN TELEVISI DAN RADIO UMUM PADA KABUPATEN TAHUN 1978 - 1982

DISTRIBUTION OF PUBLIC TV SETS AND RADIO SETS BY DISTRICT, 1978 - 1982

	Kabupaten *District*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	Lombok Barat/*West Lombok*	31	30	54	-	23	25
2	Lombok Tengah/*Central Lombok*	19	27	37	-	25	25
3	Lombok Timur/*East Lombok*	19	27	54	-	30	25
4	Sumbawa	-	12	75	-	46	48
5	Dompu	-	-	34	-	17	16
6	Bima	5	-	86	-	64	60
	Jumlah/*Total*	74	96	340	-	205	199

Film and theatre and no lest significant as communication media although the bigger attention is on the entertainment. Number of film turned on and theatres are continually increasing. Up to the end of 1979, theatres in West Nusa Tenggara numbered 25 units with dispersion by district as follows : West Lombok 6 units; Central Lombok 2 units; East Lombok 3 units; Sumbawa 6 units; Dompu 3 units ; and Bima 5 units.

During Pelita III the circulation of film showed an increase. Up to 1982/83 the number of films had been turned on were 10,783, comprising of : 4,088 units of national films, 6,695 units of imported films. The number up to August 1983/1984 became 11,141 units with the composition : national films 4,200 units and imported films 6,941 units.

Development of newspapers in West Nusa Tenggara

Prior to the ascent of the New Order, the printed media was very difficult to grow in West Nusa Tenggara, although efforts of publishing daily, weekly monthly newspapers had been attempted for a long time by the community. Before Pelita I, the Gelora newspaper had been published 3 times a week with 4 folio pages. The publication was maintained up to 1974 with edition of ± 1000 copies. Efforts of publishing newspapers had also been executed by some publishing firms such as Bulletin, published by the Traffic Police, Regional Police Command of West Nusa Tenggara; Bhakti ABRI was media of ABRI voice such as AB daily (Armed Forces), and the last was "Mataram Post" which appeared only a few months on the eve of the General Election in 1977 with edition of 3.000 copies per day.

Newspaper could not develop well in West Nusa Tenggara, because reasonable facilities of printing had not existed, while the purchasing capacity nad the rwading habit of the community was low.

The community of West Nusa Tenggara generally prefer to subscribe newspapers from outside the area or newspapers published in Jakarta. By the progress of transportation. newspapers of Jakarta can be received in West Nusa Tenggara, especially Lombok island, on the same day or the following day of publication.

Government publishing, namely publications through the Regional Government authorities at Provincial level as well as District level, better known as special publication, participate in giving information to the community. Average edition is small-scale, around 250 up to 500 mimeographed copies. Distribution is for Government officials and officials of respective authorities. Information publication for rural community has been supported by fund for the

Penerbitan Penerangan untuk masyarakat pedesaan telah ditunjang dengan biaya peningkatan Operasi Penerangan dalam bentuk bulanan "SUAR" dan "CAHAYA". Oplahnya masing-masing 1.000 eks. Di Kantor-kantor Departemen Penerangan Kabupaten juga diterbitkan pula buletin-buletin penerangan dengan oplah rata-rata tiap bulan 750 eks.

Jumlah suratkabar dan majalah yang beredar di Nusa Tenggara Barat pada akhir Pelita II diperkirakan berjumlah 6.000 eksemplar. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat 2,6 juta menunjukkan prosentase dari pembaca suratkabar di Nusa Tenggara Barat sangat kecil (0,002%).

Untuk membangkitkan kegemaran membaca masyarakat desa dikembangkan penerbitan-penerbitan ke pedesaan.

Sejak Pelita III suratkabar dan majalah terbitan Jakarta, Surabaya dan Denpasar umumnya beredar luas di seluruh NTB. Selain itu ada pula penerbitan-penerbitan yang diselenggarakan di Propinsi NTB sendiri. Penerbitan-penerbitan tersebut adalah, Media NTB, TKS/BUTSI, Gembala, Epidemilogi, Lembaran Karya, Sinar, Obor Cemerlang, Koperasi, Bulletin Perpustakaan Universitas Mataram, Bulletin Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Bulletin Informasi Pertanian, Wibawa, Lentera, Dile, Dian, Bulletin Penerangan Wanita Pedesaan, Informasi, Media Desa, Damar Tani, Purnama, Suar, Kumandang, Oryza, Titian, Berita IDI, Gema Sosialia, Media Universitas Mataram, Warta BIC (Building Information Centre).

Kewartawanan

Untuk mendorong pemantapan wadah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah Nusa Tenggara Barat, telah ditingkatkan status Pengurus PWI Persiapan Perwakilan Nusa Tenggara Barat menjadi PWI Perwakilan dengan pengurus lengkap sejak tanggal 15 Agustus 1982. Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat juga telah memberikan sumbangan bagi kegiatan PWI Nusa Tenggara Barat berupa gedung/kantor Sekretariat PWI, dan kantor LKBN "Antara" Cabang Mataram pada lokasi yang sama. Disamping itu juga diadakan kerjasama dengan PWI Perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam bentuk penyelenggaraan pekan-pekan Orientasi untuk peningkatan profesi Wartawan di daerah ini.

Promotion of Information Operation in the form of "SUAR" and "Cahaya" monthlies. Its respective edition is 1,000 copies. In District Information Office, information bulletiness are also published with average edition of 750 copies per month.

Newspapers and magazines circulated in West Nusa Tenggara Barat at the end of Pelita II was estimated at 6,000 copies. Compared with 2.6 million people of population in West Nusa Tenggara, the persentage of readership was very low (0,002 %).

To cultivate reading habit among the rural community, rural publications have been developed. Since Pelita III newspapers and magazines edition of Jakarta, Surabaya and Denpasar generally circulate widely in NTB (West Nusa Tenggara). Besides there are also editions which are executed in NTB itself. They include Media NTB, TKS/BUTSI (Tenaga Kerja Sukarela Indonesia/Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesi/Voluntary Workforce of Indonesia/Board of Voluntary Workforce of Indonesia), Gembala, Epidemiology, Lembaran Karya, Sinar, Obor Cemerlang, Koperasi, Buletin Perpustakaan Universitas Mataram (Mataram University Library Bulletines), Buletin Informasi Pertanian, Wibawa, Lentera, Dile, Dian, Buletin Penerangan Wanita Pedesaan (Information Bulletines of Rural Women) Informasi, Media Desa, Damar Tani, Purnama, Suar, Kumandang, Oryza, Titian, Berita IDI, Gema Sosialis, Media Universitas Mataram, Warta BIC (Building Information Centre).

Promotion of Journalistic Profession

To support organization stability of the PWI (Persatuan Wartawan Indonesia = Indonesian Journalists Association) in West Nusa Tenggara Region, Preparatory Management of PWI West Nusa Tenggara Representative has been promoted to become Representative of PWI with complete management since August 15, 1982.

The Regional Government of West Nusa Tenggara Province has also given aid for activities of PWI West Nusa Tenggara, namely building/office of PWI Secretariate and office of LKBN "Antara" (Lembaga Kantor Berita Nasional = Institutes of National News Agency) Mataram Branch at same location.

Besides, cooperation has been fostered with the PWI Representative of West Nusa Tenggara to organize Orientation weeks to promote journalistic profession in this region.

B A B / *CHAPTER V*

BINTANG MAHAPUTRA BAGI PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA BARAT
MAHA PUTRA MEDAL FOR WEST NUSA TENGGARA DEVELOPMENT

DAERAH kritis Lombok Selatan dan beberapa daerah di Pulau Sumbawa merupakan daerah yang sering mengalami rawan pangan. Daerah ini mempunyai tipe iklim dengan curah hujan berciri berikut : periodenya singkat, jumlah curah hujannya kecil, saat awal hujan berubah-ubah dan sulit diramalkan.

Keadaan tersebut ditambah faktor kemampuan teknologi dan kemampuan keuangan yang lemah dari petaninya sendiri, menyebabkan usaha tani (padi) banyak mengalami kegagalan, yang meng akibatkan daerah tersebut mengalami kerawanan pangan kronis. Peristiwa kekurangan pangan tersebut telah terjadi sebelum kemerdekaan dan bahkan berkelanjutan sampai dengan tahun 1979.

Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diajukan oleh ahli pertanian yaitu dengan jalan menanam padi secara gogorancah. Teknik ini tepat bagi daerah kritis seperti daerah Lombok Selatan dan beberapa kecamatan di Sumbawa, yang setiap saat selalu terancam oleh ketidaktentuan iklim.

Usaha untuk mengatasi daerah kritis dengan gogorancah telah lama dilaksanakan, tetapi sampai tahun 1979/1980 usaha tani kurang berhasil atau kurang menggembirakan.

Usaha tersebut antara lain :

a. Tahun 1964 telah dicoba diadakan perlombaan gogorancah, tetapi usaha ini tidak berkembang karena pada saat itu petani belum menguasai teknik intensifikasi tanaman pangan.
b. "Gugus Tugas Lombok", tahun 1966/1967 merencanakan penanaman padi gogorancah seluas 950 Ha yang didukung oleh 65 tenaga mahasiswa sebagai tenaga pembimbing.
c. Proyek Tani Makmur yang dilaksanakan tahun 1970/1975 yang berusaha untuk memperluas tanaman gogorancah di daerah Lombok Selatan tetapi program ini tidak dilakukan secara massal.
d. Bimas tadah hujan tahun 1979/1980 seluas 28.000 Ha dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dan Timur. Rekomendasi teknis untuk Bimas pada daerah-daerah tadah hujan tersebut adalah penanaman padi varietas IR 36 (varitas berumur pendek) untuk menjamin produktivitas usaha taninya. Realisasi Bimas tadah hujan ini mencapai 21.227 Ha (75%). Dalam pelaksanaannya mengalami kegagalan karena kurang keterpaduan dari aparat penggerak dan pelayanan; antara lain juga karena kualitas benih sangat jelek dan datangnya tidak tepat pada waktunya. Situasi aparat yang belum terpadu ini, dan diperburuk lagi dengan iklim yang kurang membantu, mendorong kita untuk melakukan percobaan hujan buatan. Walaupun demikian, seluas 6.000 Ha tanaman padi tidak tertolong (puso).
   Melihat pengalaman dari usaha yang telah dilakukan, maka mulai tahun 1980 dilaksanakan Operasi Tekad Makmur yang menerapkan prinsip keterpaduan dan partisipasi massal. Tujuan utama operasi ini adalah membebaskan daerah rawan pangan dari ancaman kekurangan pangan yang setiap tahun secara rutin melanda daerah ini.

Dengan adanya intensifikasi padi gogorancah kapasitas panen dan peningkatan produksi dapat dicapai karena sistem gogorancah akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- Penanaman lebih awal.
- Memberikan kemungkinan panen ganda.
- Mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Pengendalian Operasi Gogorancah :

a. Rencana Operasi Tekad Makmur ini ditujukan untuk menerapkan gogorancah di daerah-daerah rawan pangan. Rencana ditetapkan atas dasar kebutuhan nyata dari daerah dan bukan target dari atas. Penetapan rencana diterapkan dengan kriteria situasi daerah tadah hujan dan adanya respons dari petaninya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian-penyesuaian, yaitu berupa pergeseran rencana lokasi dari kecamatan/desa yang kurang responsif ke kecamatan desa yang berminat, meskipun bukan daerah prioritas.
b. Persiapan untuk melakukan Operasi Tekad Makmur telah dilakukan dengan sarana pembinaan kondisi mental psikologis dari masyarakat/petani. Untuk menumbuhkan minat petani telah dilakukan kampanye oleh Tim Penerangan Terpadu dan intensif. Kampanye dilakukan oleh Tim yang terdiri dari berbagai instansi

THE CRITICAL are of South Lombok and some areas in Sumbawa island are areas that often suffer the crisis of food. This areas have the type of climate with the characteristics of rainfall are as follows : The period is short, low rainfall, the beginning of rainfall chanes and it is difficult to be forecast.

The said condition is aggravated by weak factor of technology, and finance of the farmers themselves, causing failure of the efforts of rice cultivation. Consequently the stated areas often suffer the crisis of food. The event of food shortage had happened since before independence up to 1979.

To overcome that problem, the gogorancah (a kind of dry-rice cultivation) system of planting rice has been introduced by agricultural experts. This system is suitable for critical areas like South Lombok region and some sub districts in Sumbawa, which are often threatened by inconsisten climate.

The effort to tackel the problems of critical areas with gogorancah had been executed for a long time. However, up to 1979/1980 the efforts of farmers had not successsful. The efforts can be summarized as follows;

a. In 1964 a gogorancah contest had been executed, but this effort did not succeed because at that time the farmers had not mastered the intensificatio nof food-crops cultivation
b. The "Lombok Task Force" in 1966/1967 had planed to plant gogorancah in an area of 950 Ha which was supported by 65 university students as field instructors.
c. The Tani Makmur Project (prosperous Farmers) was executed in 1970/1975, endeavouring to expand gogorancah plants in South Lombok area, but this programmme was not mass implemented.
d. Bimas (Bimbingan Masyarakat = mass guidance) of rain-fed cultivation in 1979/1980 in area of 28,000 Ha was executed in the districts of Central and East Lombok. The technical recommendation for Bimas of the rain-fed cultivation includes the planting of IR-36 rice variety (short-live variety) to enhance farming productivity. The realization of the Bimas of rian-fed cultivation reached 21,227 Ha (75 %).
The implementation failed because of less integrated motivator apparatus and service, among other things very bad quality of seeds and the supply was not punctual.
The situation of this unintegrated apparatus was worsened by uncooperative climate, obliging the use of artificial rain. However, the 6,000 Ha of rice plantation could not be saved. Benefitting from the former experiences, starting from 1980 the Tekad Makmur operation was carried out, applying integration principle and mass participation. The main aim of this operation was to free the areas of food crisis from a threat of shortage of food which every year routinely knocked down this area.

With the intensification of the gogorancah rice cultivation, the capacity of harvest and production increase could be achieved because the gogorancah system provides the following benefits :

- *Earlier planting*
- *possibility of two-time harvest*
- *absorbtion more manpower*

Control on Gogorancah Operation.

a. The Tekad Makmur Operation Plan was directed to apply gogorancah in the areas of food crisis. The plan was decided to be based on real needs of the area and not based on target from the top. Planning was applied by the criteria of the regional situation as rain-fed cultivation and response of the farmers.
   Therefore, there were adjustments in the performance, namely change of location plan form less responsive sub district/village to interested sub district/village, although they were not area of priority.
b. Preparation to execute the Tekad Makmur Operation had been reinforced with promotion facilities of psychological and mental condition of the community/farmers.
   To ariuse interest among the farmers, a campaign had been executed intensively by an Integrated Information Teams. The compaign was executed by a Team consisting of various authorities with detailed arrangement of scedule mainly at the time of land preparation.
c. Supervision of mass action was done integratedly, supported by continuous monitoring of field development by apparatus of motivator or service.

dengan jadwal yang disusun secara terperinci terutama pada masa pembongkaran tanah.

c. Pengarahan gerakan massal dilakukan secara terpadu dengan didukung oleh pencatatan (monitoring) perkembangan lapangan secara kontinyu baik oleh aparat penggerak maupun pelayanan.
d. Pelayanan catur sarana terhadap petani, baik benih, kredit, sarana produksi berjalan dengan baik dan terpadu.
e. Monitoring dan supervisi dilakukan secara intensif, baik oleh aparat penggerak maupun pelayanan.

Pelaksanaan intensifikasi gogorancah musim tanam 1980/1981, tercatat seluas 26.442 Ha atau 100,92% dari rencana seluas 26.200 Ha dengan jumlah petani peserta sebanyak 33.734 orang. Dari realisasi areal seluas 26.442 Ha tersebut diperoleh hasil produksi sebanyak 179.806 ton gabah kering panen dengan hasil rata-rata per Ha sebanyak 6,8 ton.

Sedangkan pelaksanaan intensifikasi gogorancah tahap kedua musim tanam 1981/1982, tercatat seluas 51.075 Ha dengan jumlah petani peserta sebanyak 66,116 orang. Hasil produksi yang dicapai pada tahap kedua ini sebanyak 294.484 ton gabah kering dengan hasil rata-rata per Ha sebanyak 6,1 ton. Selanjutnya dalam rangka pengadaan pangan stok Nasional tahun 1982 dari target sebesar 325.000 ton setara beras realiasinya sampai dengan Desember 1982 adalah 105.376 ton setara beras. (Lihat Tabel V-1).|

Untuk menampung persediaan beras tersebut DOLOG NTB telah menyediakan gudang permanen 6 unit dengan kapasitas 16.000 ton, semi permanen 55 unit dengan kapasitas 55.000 ton dan menyewa 101 unit dengan kapasitas 69.524 ton. Disamping itu akan dibangun 9 unit gudang permanen dengan kapasitas 22.000 ton yang diharapkan mulai berfungsi pada tahun 1983.

Sebagai telah dimaklumi, ancaman kekeringan di daerah-daerah kritis di Nusa Tenggara Barat bermula pada tahun 1930 dan kemudian dalam siklus tertentu terjadi bencana kekeringan berulang-ulang. Bahkan pada tahun 1962 dan yang lebih parah lagi terjadi pada tahun 1965 dan 1966 dengan jumlah penderita akibat kekurangan makan 10.053 dan angka kematian mencapai 1%. Pada tahun-tahun berikutnya ancaman kekeringan tersebut masih terus mengancam, namun selalu diikhtiarkan penanggulangan secepatnya, sehingga tidak sampai terjadi timbul korban jiwa.

Usaha-usaha penanggulangan daerah-daerah kritis tersebut, sebelum dilaksanakan Gerakan "Operasi Tekad Makmur", khususnya di daerah Lombok Selatan yang meliputi 9 kecamatan, diusahakan dalam bentuk pembangunan dan penyempurnaan prasarana irigasi, termasuk rehabilitasi "embung-embung" maupun usaha-usaha lainnya. Namun usaha-usaha tersebut belum memecahkan permasalahan secara keseluruhan, oleh karena proyek-proyek irigasi khususnya masih dalam tahap penyelesaian.

Kemudian atas petunjuk Bapak Presiden, sejak tanggal 12 Juni 1980 telah dimulai cara pendekatan baru melalui Usaha Tani terpadu tepat guna dengan inti kegiatan intensifikasi padi gogorancah yang dilaksanakan melalui Gerakan "Operasi Tekad Makmur". Usaha tani terpadu tersebut ternyata telah mendapat tanggapan yang spontan dari para petani. Dalam waktu singkat telah dapat disiapkan 52.400 buah linggis, cepak dan pacul masing-masing 26.200 buah dengan memobilisir para pandai besi yang ada. Realisasi penanaman pada akhirnya mencapai 26.387,4 Ha belum termasuk demfarm atau 100,7% dari target semula yang mengikutsertakan 33.285 orang petani yang tergabung dalam 2.523 Kelompok Tani di 161 Desa dalam 28 Kecamatan pada 5 Kabupaten se Nusa Tenggara Barat.

Upaya kerja keras ini ternyata membawa hasil yang besar. Berdasarkan hasil ubinan yang sudah dilaksanakan, hasil panen paling rendah waktu itu 6 ton gabah kering per hektar. Bahkan di beberapa lokasi ada yang mencapai 16,64 ton. Sedangkan sebelum diterapkan penanaman padi Gogorancah di lahan-lahan tadah hujan tersebut, hasilnya hanya berkisar antara 0,9 sampai 1,5 ton saja per hektar. Bahkan pada satu saat mengalami gagal total akibat keterlambatan dimulainya penanaman, sedangkan curah hujan rata-rata di daerah-daerah kritis itu sangat pendek, yaitu antara 3 sampai dengan 3,5 bulan saja.

Dengan perhitungan hasil rata-rata 8 ton gabah kering panen per hektar, maka hasil panen Gogorancah di Nusa Tenggara Barat pada tahun tersebut mencapai 209.600 ton gabah kering panen, atau 178.160 ton gabah kering giling. Apabila dinilai dengan uang mencapai Rp 21,3 milyar, yang berarti terjadi tambahan pendapatan petani sekitar Rp 19,5 milyar. Belum diperhitungkan keuntungan selanjutnya dari hasil tanaman kedelai, jagung dan kacang ijo yang ditanam setelah panen.

Dengan keberhasilan yang dapat dicapai setelah dilaksanakan untuk pertama kalinya Gerakan "Operasi Tekad Makmur" ini, para petani khususnya di daerah-daerah kritis tadi menemukan kembali semangat,

d. Service of four production means towards the farmers, including seeds, credit, production facilities.

e. Intensive monitoring and supervising by apparatus of motivator as well as service.

The gogorancah intensification for the planting time of 1980/1981 covered a total area of 26,442 Ha or 100,92% of the target, involving 33,734 farmers. From the relization of 26,442 Ha, production reached 179,806 tons of dry-unhulled rice with average production of 6.8 tons per Ha.

The execution of gogorancah intensification in the second period (planting time of 1981/1982) registered 51,075 ha with involvement of 66,116 farmers.

Production of this second period were 294.484 tons of dry-unulled-rice with average production of 6.1 tons per Ha. Furthermore, in the framework of providing the National Stock of food in 1982, from target of 325,000 tons of rice equivalent, its realization up to December 1982 were 105,376 tons. (See Table V–1)

Tabel / *Table V - 1*
PERKEMBANGAN INTENSIFIKASI GOGORANCAH
GOGORANCAH INTENSIFICATION

Uraian/*Legend*	*1980/1981*	*1981/1982*	*1982/1983*
Peserta *Participants*	5 Kabupaten/28 Kec/ 161 Desa 33.734 KK	6 Kabupaten/43 Kec/ 289 Desa 53.390 KK	6 Kabupaten/44 Kec/ 294 Desa 71.682 KK
Luas/*Area*	26.200 ha	51.075 ha	50.425 ha
Realisasi/*Realization*	26.442 ha	47.545 ha	46.844 ha
Produksi rata-rata *Average production*	5,89 ton GKG	5,36 ton GKG	5,29 ton GKP (4,57 ton GKG)
Nilai dlm rupiah *Value in rupiah*	Rp 18,4 milyar	Rp 25,1 milyar	Rp 25,3 milyar
Kredit yang disalurkan *Credit given*	Rp 1,64 milyar	Rp 2,38 milyar	Rp 1,59 milyar

To store the state rice stock, the DOLOG NTB (Depot of Logistics of West Nusa Tenggara) had provided 6 permanent warehouse units with total capacity of 16,000 tons, 55 semi-permanent units with capacity of 55,000 tons, and 9 hired permanent warehouse units with capacity of 22,000 tons (since 1983).

As it was known, the threat of drought in critical are as of West Nusa Tenggara was first recorded in 1930 and later in certain cycle the drought disaster happened repestedly; even in 1962 and the more seriously happpened in 1965 and 1966 with the number of victims caused by famine were 10,053 person and the rate of mortality reached 1%. In the following years the drought still threatened. However, speedy overcoming was always attempted, so that the fall of victims could be avoided.

Efforts of overcoming the said critical areas before the "Tekad Makmur Operation", especially in South Lombok covering 9 sub districts, were attempted in the form of development and improvement of irrigation infrastructures, including reahabilitation of embung-embung (small reservoirs) as well as other efforts. However, the said efforts had not yet solved the whole problems, because irrigation projects were still under construction.

Then, with direct directives from the President of The Republic, 1980 a new approach had been strated through appropriate and integrated "Usaha Tani" (Farmers" Efforts) with the focus of activities on gogorancah rice intensification executed through the Tekad Makmur Operation Movement.

The stated integrated "Usaha Tani" really had got spontaneous response from the farmers. In a short time it had been provided with 52,000 units of crowbars, spades 26,200units by mobilizing local black smiths. The realization of plantation ultimately reached 26,387.4 Ha excluding demfaram or 100.7% of the target, involving 33,285 farmers who were members in 2,523 "Kelompok Tani" (Farmers groups) in 161 villages of 28 Sub Districts of 5 Districts throughout West Nusa Tenggara.

These hardworking efforts actually gave full result. Based on the production achieved, the lowest harvest production was 6 tons of dry unhulled rice per Ha. Even in some location it achieved 16.64 tons, while before the gogorancah rice plantation had been applied in rain-fed cultivation, the production only turned around 0.9 up to 1.5 tons per Ha. Even at certain time harvest totally failed because the delay in the start of plantation, while rainfall period in those critical areas was very short, namely only between 3 up to 3.5 months.

With estimated average production of 8 tons of dry unhulled rice per Ha, the production of gogorancah harvest in West Nusa Tenggara in the said

optimisme serta gairah hidupnya. Hal ini nampak dari spontanitas mereka untuk bertekad melaksanakan penanaman padi gogorancah di tahun-tahun mendatang.

"Kunci keberhasilan Gerakan "Operasi Tekad Makmur" di daerah Nusa Tenggara Barat ini, tidak lain berkat adanya petunjuk dan bimbingan Bapak Presiden, serta terpadunya langkah dan gerak dari semua instansi yang termasuk di dalam "Operasi Tekad Makmur" dari Pusat sampai ke daerah", demikian ditegaskan Gubernur NTB, H. Gatot Suherman.

"Bagi daerah yang tidak atau belum ada pengairan dan hanya menggunakan air hujan saja, kita harus pandai-pandai memanfaatkan air hujan untuk menyukseskan tanaman", demikian ditekankan Presiden Soeharto pada upacara peresmian Panen Raya Gogorancah di Desa Truwai, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 17 Maret 1981.

Berulangkali saya mendengar, ujar Presiden lebih lanjut, bahwa di daerah Lombok Selatan ini selalu kekurangan pangan sekalipun para petaninya telah mengadakan penggarapan sawahnya dengan tekun, namun hasilnya kurang memadai. Apa sebabnya? Sebabnya adalah, karena cara penggarapan sawahnya dikerjakan dengan sistem sawah. Artinya, sawahnya baru mulai digarap setelah ada air hujan. Sedangkan menggarap sawah itu memakan waktu kurang lebih tiga minggu sampai satu bulan. Dengan demikian, hujan yang hanya tiga bulan itu sudah dikurangi satu bulan, tinggal dua bulan dan baru mulai ditanam. Dengan sendirinya pada saat tanaman masih membutuhkan air, hujannya sudah tidak ada. Jelas ini akan gagal. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, sekalipun musim hujannya hanya tiga bulan, mungkin kurang; marilah kita gunakan sebaik-baiknya agar waktu musim hujan yang pendek dipergunakan untuk kepentingan tanaman yang umurnya antara 100 sampai 115 hari. Inilah letak kuncinya; sebab tanaman tanpa air dengan sendirinya akan mati.

Karena itu untuk daerah-daerah tadah hujan yang hujannya sangat pendek, yang sama umurnya dengan tanaman, harus merubah cara menggarap sawahnya. Jangan pada waktu hujan datang, tapi jauh sebelumnya kita sudah menggarap sawah dan begitu hujan datang kita mulai menanam. Sistem inilah yang dikatakan Sistem Gogorancah; kita menggarap tanah sebelum turun hujan.

Kepala Negara menyadari, bahwa sistem Gogorancah memang berat, karena tanah yang digarap adalah tanah kering dan hanya bisa menggunakan linggis. Tanah yang berbongkah-bongkah kita linggis, kita atur dengan baik, kita pecahkan sedemikian rupa dan dipetak-petak sehingga apabila turun hujan kita tinggal mengatur airnya sesuai dengan kebutuhan.

Kepada para petani Presiden mengingatkan agar Sistem Gogorancah terus ditingkatkan. Setelah sukses dengan tanaman padi, supaya dilanjutkan dengan tanaman palawija yang pendek umurnya. Dengan tanaman palawija, kata Presiden sekaligus memperoleh manfaat ganda, di satu pihak menambah penghasilan para petani dan di lain pihak, daun-daun palawija itu akan jadi pupuk hijau untuk menambah kesuburan tanah yang sekaligus akan menambah suksesnya musim tanam yang akan datang.

Presiden mengatakan sungguh berbahagia dapat turut serta menyaksikan kegembiraan rakyat di Lombok Selatan melaksanakan Panen Besar sebagai hasil jerih payahnya meningkatkan produksi pangan melalui sistem Gogorancah.

Manusia Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai umat beragama yang tetap beriman kepada Tuhan sudah sewajarnya selalu ingat kepada pencipta-Nya yang selalu murah kepada bangsa Indonesia. Karena kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, rakyat dan Bangsa Indonesia dikaruniai berbagai kekayaan alam, apakah itu minyak bumi, gas, batubara sebagai sumber energi, dan juga dikaruniai kekayaan tambang antara lain timah, nikel, tembaga, bahkan juga pasir besi dan juga kekayaan alam di hutan dan kekayaan laut, semuanya ini adalah diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Akan tetapi, kata Presiden, hendaknya kita ingat pula Firman Tuhan di dalam Al Qur'an yang artinya : Tuhan tidak akan mengadakan perubahan apapun bilamana manusia itu tidak berusaha mengadakan perubahan. Karena itu, sekalipun Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah-limpah lebih dari kekayaan alam negeri lain, akan tetapi kekayaan alam Indonesia tidak akan ada artinya bilamana rakyat Indonesia tidak berusaha untuk memanfaatkannya sendiri. Kekayaan alam tidak akan ada artinya kalau rakyat Indonesia malas, tidak mau bekerja keras untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Kalau kita ingin sejahtera kita harus bekerja keras, kita harus berusaha memanfaatkan alam tersebut untuk kemakmuran kita.

Memang, satu hal perlu diingat : bahwa Gora bukan suatu kata mukjizat; Gora bukan seperti lampu Aladin, yang begitu diucapkan muncullah sukses. Di belakang sukses Gora terdapat kerja keras. Nama

year reached 209,600 tons of harves dry unhulled rice, or 178,160 tons of dry unhulled rice. If it was evaluated in money, it amounted to Rp. 21.3 billions, making a total increase of farmers'income around Rp 19.5 billions. The profit of the soy-beans maizes, green peas plantation products planted post harvest time had not been counted yet.

With the success achieved after the "Tekad Makmur Operation" movement had been executed for the first time, the farmers especially in the aforesaid critical regions recovered their spirit and optimism. This was seen from their spontaneous determination to implement gogorancah rice plantation in the years to come.

The key to success of the Tekad Makmur Operation Movement in West Nusa Tenggara region is nothing else but the Presidential directives and guidances, and integrated steps and actions of all authorities involved in the "Tekad Makmur Operation, from Centra to regional level", explained H Gatot Suherman, Governor of NTB Province.

" In the regions that have not had irrigation and only use rain water, we have to be able to exploit rainfall to make a success of the plantation ", said President Soeharto on the accasion of inaugrating the gogorancah Great Harvest in Truwai Village, District of Central Lombok on March 17, 1981.

" I had often heard ", said the President further, " That this South Lombok region always lached food although the farmers had cultivated their ricefileds hard, but the production was not encouraging. Why ?

Because they used sawah (irrigation rice-field) system far the cultivation of their ricefields. They started to cultivated their ricefields after the rainy season had come, while the preparation ricefield took about 3 weeks up to 1 month. And so, but of the 3 months of rainy season, 1 month been substructed 1 month, and they just started to plant. Naturally, at the time the plants still needed water, the rainy season had stopped. It clearly would result in failure. Therefore we had to be thankful although the rainy season only lasted 3 months or less; let us use the short rainy season as effecient as possible for the sake of planting which last between 100 up to 115 days. This was the key, because plants without water would naturally die".

Therefore, for regions of rain-fed cultivation, where the rain period was very short, as long as the plants age the method of cultivation had to be changed. Long before the rainy season come, the land should have been prepared. Thus. when the rainy season came, planting was started. This system was called gogorancah, preparation of the land before rain came.

The Head of State realized, that the gogorancah system is actually difficult, because we cultivate the dry land and can only use the crowbars. We separate the lumps of land with a crowbar, we manage them well, we break them in a such way, and we make petales (terraces of ricefield) so that when the rain falls we just manage the water inaccordance with the needs.

The President reminded the farmers topromote the gogorancah system. After we have succeeded in rice plants, we shoud continue with palawija (second crops : planted afer rice) which last in short period. With the palawija, said the Pesident, we all at once got multiplaying profit, on one side to increase the income of farmers and the other side, the palawija leaves will become green fertilizer to the land which all at once will enhance success in the next planting time.

The President said that he was very happy to see people's joy in South Lombok to execute the Great Harvest as a result of their efforts toincrease food products through the system of gogorancah.

The Indonesian people who believe in God Almighty, as religious believers who believe in God, naturally always remembe their Creator who is always beneficent to the people of Indonesia. By his beneficience, the people and nation of Indonesian are rewarded with natural wealths such as crude oil, gas, coal as energy sources, and are also rewarded with mineral deposits such tin, nickle, copper, and even iron-sand and natural wealth in the forest and the sea, all of these things are presented for the welfare of the people of Indonesia.

However, said President, we have to remember the enunciation in the Al Qur'an to the effect that God will not make anychange if the human beings do not make any effort to change. Therefore, although Indonesia has abundant natural resources more than natural resources of oter countries, the natural resources of Indonesia will have no meaning if the people of Indonesia do not make efforts to benefit by themselves. Natural wealths will not have any meaning if the people of Indonesia are lazy, reluctant to work hard to exploit the stated natural wealths. If we want to be preperous we have to work hard, we have to make attempt to exploit the natural wealths for our prosperity.

Obviously, a case to be remembered: that Gora (abbreviation of gogorancah) is not a miracle; Gora is not like the Aladin lamp, just to be

programnya saja "Operasi Tekad Makmur". Ada tekad, ada operasi atau ada kerja keras, untuk meraih keadaan makmur.

Nyaris tidak masuk akal.

Itulah kesan pertama ketika Tim Redaksi "Indonesia Membangun" melakukan pengumpulan data dan peninjauan lapangan di Nusa Tenggara Barat pada penghujung bulan Juni 1986 yang lalu.
Ceritanya adalah sbb. :

Pada masa lampau bukan hanya sekali daerah Nusa Tenggara Barat mengalami kekurangan pangan. Pada tahun 1965 keadaan demikian parahnya sehingga menjadi masalah nasional. Yang terakhir di antaranya terjadi baru beberapa tahun berselang. Setelah kemarau panjang yang tak teramalkan sebelumnya, tanah-tanah pertanian di Nusa Tenggara Barat retak-retak. Dan gagallah sebagian besar panen tanaman padi.

Sesungguhnyalah, sebagian dari daerah Nusa Tenggara Barat, terutama di Lombok bagian Selatan, merupakan daerah pertanian yang kritis. Sudah sejak sebelum Pelita I masalah tanah kritis ini menjadi perhatian para ahli, bagaimana menjadikannya lahan yang produktif.

Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, akhirnya jawaban yang tepat ditemukan pada sistem pertanian Gogorancah dipadu dengan sistem Bimas dan Inmas yang selanjutnya ditingkatkan dengan Insus.

Alhasil inilah hasilnya; suatu hal yang sulit diterima akal; atau katakanlah, tak kurang dari suatu mukjizat! Ketika Tim Redaksi "Indonesia Membangun" melakukan peninjauan lapangan, kemana pun Tim pergi, bukan hanya tanaman padi yang subur memikat pandangan, tetapi juga vanili, jeruk dan palawija. Tembakau, apalagi! Upaya mensukseskan pertanian Gogorancah di tanah kritis ternyata sekaligus mendorong peningkatan usaha pertanian di lahan-lahan lainnya yang memang subur sejak semula. Gairah ini demikian pesatnya berkembang sehingga menyebabkan gejala penggundulan bukit-bukit di beberapa tempat. Untunglah Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat mampu memantau gejala ini pada tahap dini, dan segera melancarkan upaya-upaya pelestarian alam.

Kemampuan di bidang pertanian ini segera menunjukkan dampaknya yang positif terhadap kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Pendapatan masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Keinginan untuk memperoleh pendidikan formal maupun non formal, lantas menjadi suatu kebutuhan. Melalui berbagai upaya pendidikan ini diharapkan taraf kehidupan masyarakat dapat lebih meningkat lagi. Nampaknya bagi masyarakat NTB, masalah pendidikan ini amat mendasar sekali. Minat masyarakat untuk mendidik anak-anaknya di sekolah-sekolah sangat besar.

Program Pemerintah Daerah di bidang pendidikan formal dan non formal diberikan prioritas yang tinggi, secara spontan disambut baik oleh masyarakat. Demikianlah ditingkat desa dan Kecamatan dapat kita lihat Sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai SLTA.

Pendidikan non formal juga tidak ketinggalan, oleh karena itu jauh sebelumnya. Pemerintah Daerah menyadari bahwa tingkat ketrampilan sebagian besar masyarakat NTB masih perlu ditingkatkan. Untuk itu didirikanlah pusat-pusat pengembangan ketrampilan atau Balai Latihan Kerja. Melalui pendidikan non formal ini, ketrampilan masyarakat terus diasah dan disempurnakan sehingga Pemerintah Daerah bila perlu tak ragu-ragu untuk memberikan izin kerja ke luar NTB.

Dampak keberhasilan NTB di sektor pertanian tersebut banyak terasa di sektor-sektor lain, antara lain sektor kesehatan, kependudukan dan lingkungan hidup, dan lain-lain. Kalau dalam Pelita I kondisi kesehatan dan gizi makanan sebagian besar masyarakat masih relatif rendah, kenyataannya sekarang tidaklah demikian. Pelayanan kesehatan masyarakat disamping ditingkatkan juga sudah luas pelayanannya. Sebagai contoh dapat dilihat kegiatan para ibu yang secara berkala datang membawa anaknya untuk ditimbang beratnya. Hal ini berarti adanya kesadaran menimbang anaknya untuk mengetahui berat badan anaknya. Hal ini merupakan tolok ukur peningkatan kesadaran masyarakat di sektor kesehatan maupun di bidang gizi. Demikian pula kesadaran mempergunakan air bersih sudah merupakan sebahagian dari kebiasaan hidup masyarakat. Proyek air bersih di NTB sejak Pelita II telah mendapat bantuan dari Pemerintah Australia. Bidang kesehatan, khususnya kesehatan anak, mendapat bantuan dari UNICEP. Bantuan ini sangat besar pengaruhnya terhadap sikap mental masyarakat NTB mengenai perlunya kesehatan.

Keberhasilan di berbagai sektor ini juga telah membuat masyarakat NTB lebih terbuka terhadap pendatang-pendatang. Masyarakat agaknya sudah akrab dengan kehadiran turis asing. Hal tersebut dapat disaksikan, begitu ferry datang dari Bali dan tiba di Lembar (Lombok) ataupun pesawat mendarat di Pelabuhan Udara Selaparang. Sikap masyarakat NTB yng luwes ini digabung dengan pantai berbukitnya, dengan pemugaran objek-objek Purbakala seperti Taman Narmada dan hidangan ayam goreng/bakar Taliwangnya sebagai masakan khasnya,

said, then success follows. Behind the success of Gora there is hard work. The name the Programme is "Tekad Makmur Operation". There is a tekad (tekad = strong will), there is and operation or hard work, to achieve the condition of makmur (makmur = prosperous). It is almost unbeleivable!

That was the first impression when the Editorial Team of "Indonesia Membangun" collected data observed the field in West Nusa Tenggara at the end of July 1986.

The story is as follows :

A long time ago not only once did West Nusa Tenggara suffer food shortage. In 1965 the condition was so serious that it became a national problem. The last just happened some years ago. After an unexpected long draught, farming land in West Nusa Tenggara was crached. And most harvests failed.

Actually, a part of West Nusa Tenggara region, mainly in Southern part of Lombok, was critical farming land. Since pre-Pelita I the problem of critical land became the focus of attention among the experts: how to meke them become productive land.

After various efforts ended in failure, finally the exact answer was found in the Gogorancah system integrated with Bimas (Bimbingan Massal = Mass guidance) and Inmas (Intensifikasi Massal = Mass intensification) and afterwards it was promoted to become Insus (Intensifikasi Khusus = special Intensification). Eventually that was the result : something that was difficult to be logically received; or let us say it was no less than a miracle! When the Editorial Team of "Indonesia Membangun" made field observation, where ever the team went not only fertile rice dominated the scene but also the plantation of vanilla, orange, palawija (plantation planted after rice harvest time). Tobacco, especially ! Indeed, the efforts to make a success of the Gogorancah farming in critical land have stimulated farming efforts in other fertile land. This fervour developed quickly so that it caused the tendency to devour the hills in some places. Fortunately the Regional Government of West Nusa Tenggara was able to monitor this aspect early, and speedly launched efforts of natural preservation.

The ability in agricultural field speedily showed a positive impact towards the social-economic and social-cultural conditions of the community, Income of the community increased from year to year. The desire to get formal as well as non formal education, became need. Through various efforts of education it was expected that the standard of living could be stepped up further. Appazently, for community of NTB, education is a basic need. The desire of the community to send their children to school is almost palpable.

The Regional Government programmers in the field of formal and nonformal education are given high priority. They are welcomed by the community. Even in villages and sub districts schools from the level of Kindergarten up to SLTA (Senior High School) have been made available.

Non-formal education does not lag behind. Since long the Regional Government has realized that the vocational skills of the community in NTB are still necessary to be developed. To that end, manpower development centers and Workshops have been established. Through this non formal education, the vocational skills of the community are continually promoted and perfected so that the Regional Government, if necessary, will not hasitate to give Work license to outside NTB.

The impact of NTB success in agricultural sector is strongly felt in other sectors, such as health sector, population and living environment sector, and miscellany. While in Pelita I the condition of health and nutrition of most people was relatively low, now the fact is not longer like that. Public health service increased in quantity as well as coverage to remote areas. For instance, mothers can be seen periodically to bring their children to have weigh-check. This is measure of the increase of the community's awareness in health sector as well as in nutrition field.

And the awareness of using tap water has also been a part of living habit among the community. Tap water project in NTB since Pelita II had received aid from the Australian Government. Health development, especially pediatrics, got aid from Unicef. This aid had a very big influence towards the mental attitude of the community in NTB concerning the need of health.

The success in various sectors have made the community in NTB more open towards visitors. The community apprently have been familiar with foreign tourists. This can be witnessed. When ferry comes from Bali and arrives in Lembar (Lombok) or plane lands in Selaparang Airport. The flexibel attitude of the community in NTB coupled with thehilly-coasts, restoration of archaelogical objects such as Narmada Park and fried / baked chicken of Taliwang as specific food, make tourism in this region prospectful in the future.

menjadikan pariwisata di daerah ini mempunyai hari depan yang cerah.

Dengan kenaikan pendapatan NTB melalui keberhasilan di berbagai sektor, meningkat pula animo masyarakatnya untuk membangun tempat-tempat peribadatan dan menjalankan ibadah Haji. Terlintas pemadnangan yang sangat mengharukan di saat jemaah melangkahkan kaki menuju pesawat terbang untuk berangkat menunaikan Haji. Wajah yang berseri-seri disertai penuh doa, tergambar dari wajah para pengantar calon haji yang bagaikan arak-arakan tiada putus dari kota Mataram menuju Pelabuhan Udara Selaparang.

Kemampuan di bidang teknologi juga terlihat cukup pesat pengaruhnya dalam penyediaan lapangan kerja. Proyek budidaya udang di Lombok Timur dan budidaya kerang mutiara di Bima yang boleh dikata merupakan gudangnya potensi budidaya pasar, telah berhasil membuka lapangan kerja. Daya tarik penanaman modal asing di daerah ini telah mampu meningkatkan ekspor non migas sejalan dengan kebijaksanaan ekspor nasional.

Perkembangan di bidang transportasi patut dibanggakan pula. Sepuluh tahun yang lalu situasi dan kondisi perhubungan cukup memprihatinkan; jarak antara kota dengan kota lainnya cukup menyita waktu dan tenaga/biaya. Pada saat ini hubungan NTB ke Bali dapat ditempuh dengan biaya ringan melalui ferry; demikian juga antara Lombok dan Pulau Sumbawa cukup dengan ferry yang ongkosnya relatif murah. Bukan saja sektor transmigrasi ini cukup banyak menyerap tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

Berkat makin membaiknya sektor transportasi tersebut, meningkat pula mobilitas masyarakat, dan mendorong kegiatan ekonomi. Sarana perdagangan diremajakan dan diperluas. Cukup menarik untuk dicatat bahwa pembangunan berbagai pasar, antara lain di Sweta dan Narmada, menunjukkan adanya perencanaan jauh ke depan. Demikian pula pengaturan lalu-lintas di kota Mataram banyak diatur searah, jauh sebelum timbulnya kemacetan-kemacetan.

Dengan satu kalimat, pembangunan di Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan sebagai adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup, perencanaan yang memandang jauh ke depan dan kesediaan bekerja keras. Maka tepat sekali kalau Gubernur **H.Gatot Suherman** mengatakan bahwa Bintang Mahaputera yang dianugerahkan kepadanya tanggal 14 Agustus 1986 adalah berkat hasil perjuangan pembangunan rakyat NTB.

Selamat !

By income improvement of NTB throught the success in various sectors, the interest of the community to establish house of worship and to make the pilgrimage to Mecca also increased. It is indeed very touching to see the group of pilgrims going to Mecca make the steps in the direction of the plane.

Delight accompanied with players reflect from the faces of relatives and companions walking in uninterrupted procession from Mataram city to Selaparang Airport to see the pilgrims off.

Progress in the filed of technology has speedy impact in providing employment opportunity. Projects of shrimps cultivation in East Lombok, and part-oyster culture in Bima considered as a warehouse of potential market, have succeeded in opening employment opportunity. Foreign investment in this region has also been able to increase non-oil-and-gas export in parralell with the national export policy.

Development in the field of transportation in subject to be boasted of. Ten years ago the situation and condition of transportation were dismal ; the distance between one city to another consumed considerable time and energy / cost. At present transportation from NTB to Bali can be reached at low cost via ferry; and so is also beween Lombok and Sumbawa Island, can be reached by ferry with relatively low cost. Not only this transportaion sector absorbs many workers but also increases regional income and community income.

With the improvement of the said transportation sector, the mobility of community also increases. It also enhances economic activities. Trade facilities are renewed and expanded. It is worth-nothing that the establhisment of various markets, such as in Swasta and Narmada, shows a far-sighted-plan. And the traffic in Mataram city has been regulated wit one-way arangement long before traffic jams happen.

In sort development in West Nusa Tenggara can be concluded as reflecting the will to improve the standard of living, a far-future planning and determination to work hard. Thus it rings true when Governor H. Gatot Suherman Said that the Mahaputera Medal which was bestowed to him on August 14, 1986, is actually a prize-award for the development achievements of the people in NTB.

Congragulations !

DI DALAM TUBUH YANG SEHAT TERDAPAT JIWA YANG SEHAT SALAH SATU SISI PEMBANGUNAN BANGSA YANG PATUT DISADARI SETIAP RAKYAT INDONESIA

EKSPOR NON MIGAS ADALAH MASALAH NASIONAL PATUT DIPIKIRKAN, DIOLAH UNTUK JANGKA PANJANG DEMI KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA

Propinsi NUSA TENGGARA TIMUR



SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

Buku "INDONESIA MEMBANGUN" yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia, mengetengahkan proses Pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan dapat cepat terwujud apabila setiap program yang direncanakan dan akan dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan pokok rakyat banyak serta bermuara pada perbaikan mutu manusia Nusa Tenggara Timur.

Untuk itu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur menjabarkannya melalui Panca Program yang meliputi: Peningkatan produksi pangan, Peningkatan produksi tanaman perdagangan serta Hortikultura, Peningkatan mutu dan pelayanan Koperasi/KUD, Meningkatkan derajat kesehatan, Meningkatkan pemasyarakatan Keluarga Berencana, Meningkatkan pelaksanaan Wajib Belajar dan mutu Pendidikan; dan kemudian Panca Warsa Benah Desa yang dicanangkan sejak tanggal 1 April 1985.

Panca Warsa Benah Desa adalah suatu gerakan serta program terpadu yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat untuk membentuk masyarakat Hukum Baru, dengan menata dan mengembangkan kemampuan Lembaga Desa, agar menggerakkan potensi dalam Desanya serta menata Wilayah Desa secara teratur, serasi dan lestari, sehingga Desa menjadi basis ketahanan Nasional.

Nusa Tenggara Timur tidak berhenti pada lima program tersebut, waktu berlalu, manusia berkembang. Dan oleh perkembangan tersebut, cakrawalanya bertambah, harapan-harapannya menjadi lebih banyak dan tinggi.

Bersamaan dengan upaya-upaya Pemerintah dan masyarakatpun bertambah. Program Transmigrasi, Program pengembangan industri jasa, program perluasan jaringan jalan, program perluasan penanaman modal dalam bidang Pertambangan, Perikanan, Perkebunan, Perdagangan dalam dan luar Negeri dijalankan terus menerus, yang akan menjadi program-program inti pada Pelita berikut.

Dengan semboyan dan semangat yang ditanamkan dan selalu membara untuk membangun Nusa Tenggara Timur ialah :
"Kalau bukan kita, siapa lagi"
"Kalau bukan sekarang, kapan lagi"

Saya menyambut baik diterbitkannya buku "Indonesia Membangun".

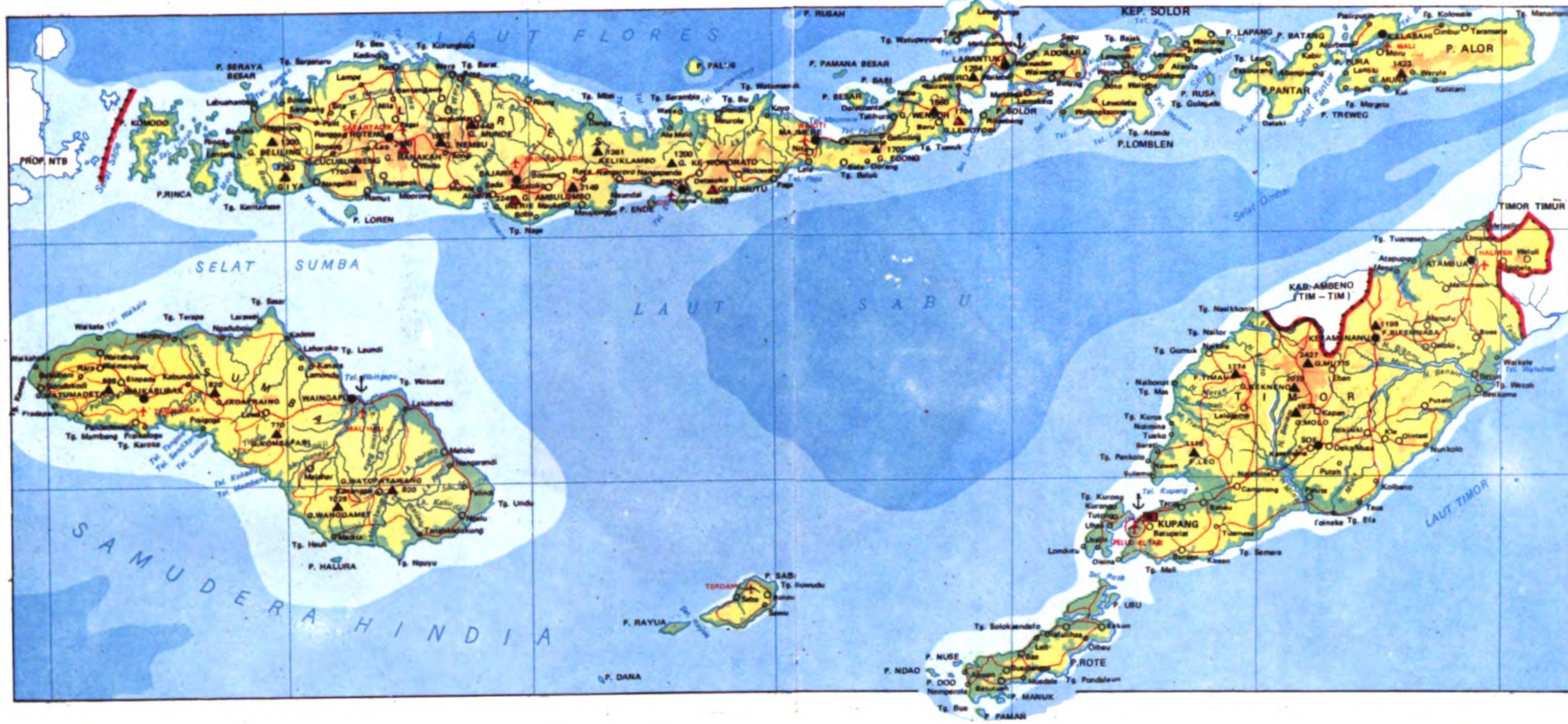
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang besar dalam menunjang Pembangunan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini.

Kiranya Tuhan selalu menyertai kita.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

BEN MBOI


NUSA TENGGARA TIMUR
1958



LAUT FLORES
SELAT SUMBA
LAUT SABU
SAMUDERA HINDIA
LAUT TIMOR
KEP. SOLOR
P. ALOR
P. PANTAR
P. LOMBLEN
TIMOR TIMUR
KAB. AMBENO (TIM - TIM)
KUPANG
P. ROTE
P. SABU
P. RAYUA
P. DANA
P. HALURA
WAINGAPU
KOMODO
P. RINCA
PROP. NTB
P. LOREN
P. PALU'E
P. RUSAH
P. PAMANA BESAR
P. SERAYA BESAR
ATAMBUA
KEFAMENANU
LARANTUKA
ADONARA
SOLOR
ENDE
KALABAHI

B A B / *CHAPTER I*

M O N O G R A F I / *MONOGRAPH*

1. Geografi

PROPINSI Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari banyak pulau dan wilayah yang terletak di bagian Selatan Tenggara Tanah Air.

Secara langsung berbatasan dengan lautan Indonesia, sedang dengan benua Australia dibatasi laut Timor. Karena itu secara geostrategis, letaknya menuntut ketahanan wilayah yang tinggi, baik dilihat secara sosial budaya, politik, ekonomi maupun hankamnas.

Letak geografis propinsi ini membentang antara 8° Lintang Selatan di sebelah Utara dan 12° Lintang Selatan di sebelah Selatan serta 118° Bujur Timur di sebelah Barat dan 125° Bujur Timur di sebelah Timur. Karena posisi inilah, menjadikan propinsi ini terletak di bagian paling Selatan Indonesia.

Topografi Nusa Tenggara Timur sebagian merupakan daerah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan kemiringan 17° — 26° lebih. Sedang di bagian tengah pulau tersebut sedikit agak berombak dengan kemiringan 3° — 15°.

Jika dikaitkan dengan lingkungan hidup, rata-rata kemiringan adalah 16° — 40°. Dengan demikian bahaya erosi dan bencana alam lainnya sering terjadi, terutama pada lokasi tanah kritis.

Di kepulauan Flores bagian Barat dan Timur, sebagian besar terdiri dari wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Selebihnya terdiri dari bagian yang agak bergelombang termasuk daratan Sikka yang agak luas dengan kemiringan 17°—26°. Topografi di kepulauan lain seperti Sumba, Timor serta pulau-pulau kecil lainnya juga berbukit-bukit dan bergelombang.

Wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1 kota Administratif, 12 Kabupaten, 98 Kecamatan, 48 Perwakilan Kecamatan, 10 Koordinator Pemerintahan Kota dan 1.724 Desa dengan luas wilayah 49.879,98 Km². Lihat Tabel I-1.

Perincian luas wilayah yang membentuk Propinsi Nusa Tenggara Timur antara lain terdiri dari 3 Pulau besar. Masing-masing Flores, Sumba dan Timor serta kepulauan kecil lain di sekitarnya.

Dari keseluruhan wilayah propinsi ini, sebagian terdiri dari dataran. Selebihnya merupakan lembah curam. (Lihat Tabel I — 2)

1. Geography

THE PROVINCE of East Nusa Tenggara consists of many islands and regions locating at the south-southeast part of Indonesia.

It directly borders on Indonesian Ocean, while Timor Sea indicates its boundary with the Australian continent. It is this geostrategical position that requires substantial teritorial resilience in East Nusa Tenggara, either in social cultural, political and economical fields or in national security and defence.

Geographycally, this province lies between 8° South Latitude in the north part and 12° South Latitude in the south part and between 118° East Longitude in the west part and 125° East Longitude in the east part. On this account, its position is in the very south of Indonesia.

The topography of East Nusa Tenggara indicates that this area is partly hilly and mountainous and has a steepness of 17° - 26° or more, while its mid part undulates slightly and has a steepness of 3° - 15 °.

Related to the living environment, the average steepness is 16° - 40°, which means that erosion and other natural disasters might possibly occur frequently, especially in the spots of critical soils.

The west and east parts of Flores archipelago mostly consist of hilly and mountainous areas, while the rest undulate slightly, including Sikka land, with a steepness of 17° - 26°. The topography of other archipelagos, such as Sumba, Timor and other small islands, is also the same as that of Flores.

The territory of East Nusa Tenggara, the whole extent of which is 49.879,98 km², includes 1 Administrative Town, 12 Districts, 98 Sub-districts, 48 Branch Sub-districts, 10 Urban Administration Coordinators and 1,724 Villages. See Table I - 1.

The territory forming the Province of East Nusa Tenggara consists of 3 big islands, ie Flores, Sumba and Timor, and small islands around them.

Some parts of this territory are in the form of plains, while the others are steep slopes. See Table I - 2.

Tabel / *Table I — 1*

NAMA IBUKOTA KABUPATEN, BANYAKNYA KOTA ADMINISTRASI, KOPETA, KECAMATAN, PERWAKILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN 1985
THE NAMES OF DISTRICT CAPITALS, THE NUMBER OF ADMINISTRATIVE TOWNS, URBAN ADMINISTRATION COORDINATORS, SUB—DISTRICTS, BRANCH SUB—DISTRICTS AND VILLAGES, 1985

Kabupaten/ *District*	Ibukota Kabupaten *District Capital *)*	Kota Administratif *Administrative Town*	Kopeta *Urban Administration Coordinator*	Kecamatan *Sub-district*	Perwakilan Kecamatan *Branch Sub-District*	Dusun Kelurahan *Village*
1	2	3	4	5	6	7
01. Sumba Barat *West Sumba*	Wuikububuk	—	1	7	6	125
02. Sumba Timur	Waingapu	—	1	6	2	99
03. Kupang	Kupang	1	—	17	—	275
04. Timor Tengah Selatan	S o E	—	1	—	6	166
05. Timor Tengah Utara	Kefamenanu	—	1	5	3	113
06. Belu	Atambua	—	1	6	3	73
07. Alor	Kalabahi	—	1	5	3	56
08. Flores Timur	Larantuka	—	—	13	7	233
09. Sikka	Maumere	—	1	7	3	90
10. Ende	Ende	—	1	6	5	103
11. Ngada	Bajawa	—	1	8	2	136
12. Manggarai	Ruteng	—	1	10	6	255
Jumlah / Total	—	1	10	98	48	1.724

*Keterangan: *) Kupang Utara dan Larantuka berbentuk Kecamatan, sedangkan lainnya berbentuk koordinator pemerintahan kota (Kopeta).*
Note: *) Both North Kupang and Larantuka are Sub-districts, while the others are Urban Administration Coordinators.

Luas dataran itu merupakan modal dasar bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai tempat tinggal dan sumber daya pencari nafkah.

Selain tanah-tanah yang bersifat produktif berdasarkan fungsinya, ada pula tanah yang kritis karena pengaruh cuaca.

Daerah pertanian dan industri yang potensial untuk dikembangkan antara lain: Basikama, Kabupaten Belu; Kodi, Kabupaten Sumba Barat; Mamboro, Sumba Barat, Mbai, Kabupaten Ngada serta pulau Flores, disamping masih banyak lagi daerah-daerah lain.

Iklim

Iklim di Propinsi Nusa Tenggara Timur, adalah iklim kering dipengaruhi oleh angin muson, di mana terdapat musim hujan yang pendek sekitar bulan Desember sampai April. Untuk musim kering biasanya jatuh sekitar Mei sampai November.

Suhu udara rata-rata berkisar pada 39°C Maksimum dan 20,4°C minimum, sedangkan curah hujan rata-rata sekitar 1.164 mm dengan jumlah hari sebanyak 71 hari. Jadi dalam satu tahun rata-rata turun hujan selama 3 bulan dan 9 bulan lainnya adalah musim kemarau.

Tingkat penyebaran hujan sangat bervariasi antar wilayah yaitu mulai dari 1.000 — 4.000 mm dengan jumlah hari hujan.

Dari penyebaran ini dapat diperinci sebagai berikut:

- Wilayah Flores bagian Barat, meliputi daerah Manggarai dan Ngada mendapat curah hujan selama tahun 1980 sebanyak 3.849 dengan rata-rata 320 mm per bulan selama 254 hari. Hal ini menunjukkan, daerah ini termasuk daerah hujan. Dengan demikian sangat cocok untuk wilayah pertanian dan perkebunan yang berumur relatif pendek.
- Wilayah Flores Timur, Sikka dan Ende merupakan daerah kering. Setiap tahunnya rata-rata mendapat curah hujan sebanyak 1.711. Jadi satu bulan rata-rata berkisar 142 mm dengan jumlah hari sebanyak 184.
- Wilayah Timor dan pulau-pulaunya serta wilayah Sumba merupakan daerah kering terutama Sumba bagian Barat. Daerah-daerah ini sangat terbatas untuk pertanian, tetapi tanah-tanah untuk pengembalaan sapi relatif sangat luas.

Geologi

Dari hasil penelitian sementara di daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ternyata banyak terdapat berbagai macam deposit, baik mineral maupun sumber-sumber energi lainnya. Hampir sekitar 100 buah lokasi di daerah ini mengandung mineral dan sumber energi alam.

Disamping ditemukannya berbagai macam deposit seperti disebutkan di atas, juga ditemukan sumber energi bumi/bahan bakar minyak di Pulau Sumba, Timor dan sepanjang pantai Flores bagian Timur. Demikian pula sungai-sungai besar seperti No Elmina, Noilbanain dan sungai Kambaniru dapat dikembangkan menjadi sumber energi yang besar.

Secara keseluruhan mineral dan sumber energi alam yang terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Timur ialah: Gips, Kaolin, Limestone, Clay, Asbestos dan Pasir Besi. Disamping itu juga terdapat beberapa mineral vital seperti Ferrum, Plumbum, Mangaan, Aurum, Zincum dan Argentum.

Jenis-jenis mineral strategis terutama Cuprum, Uranium, Nikkel dan sejenisnya banyak terdapat di sekitar Sumba Barat, Riung, Serapa, Lomblen, Alor, Arapupu, Bubur Loran, Camplang, Amarasi dan Tonini. Perlu juga diketahui bahwa hampir di seluruh Kabupaten di Pulau Flores terdapat sumber panas bumi.

Untuk lokasi jenis Aurum yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah daerah sekitar Maubesi, Pegunungan Kefa, daratan Parewatana, Katikutana, Noilbijeli, Noilnisnoni, Noilbisiam, Naeteke, Amfoang, Naunbaun dan daratan Taupukan. Sedangkan untuk bahan energi seperti Pasir Besi khusus hanya terdapat di Kepulauan Alor.

Vegetasi

Kondisi vegetasi tanah di Nusa Tenggara Timur pada umumnya merupakan savana, yaitu padang rumput yang banyak pepohonan.

Jenis pohon yang banyak tumbuh di daerah ini meliputi Cendana, Akasia, Kaswari, Kayu Putih, Lontar Gewang serta jenis-jenis tanaman lainnya.

Dilihat dari tingkat penyebaran hutan menurut jenisnya, di Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat sekitar 20,82% saja dari wilayah keseluruhannya. Sedangkan lainnya merupakan hutan primer dan hutan sekunder.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka dapat disebutkan bahwa Pulau Timor lah yang mempunyai hutan cukup luas, yaitu 400.000 Ha, dibanding dengan daerah Sumba yang mempunyai lokasi hutan sekitar 183.000 Ha. Dengan demikian, dilihat dari kon-

Tabel / *Table I — 2*

LUAS WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
THE TERRITORIAL EXTENT OF THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

Nama Pulau / ***Island***	**Luas (Km2)** / ***Extent (Km2)***
01. Pulau Timor/*Island* Timor *)	14.394,9
02. Pulau Rote/*Island* Rote	1.214,3
03. Pulau Sabu/*Island* Sabu	421,7
04. Pulau Alor/*Island* Alor	2.073,4
05. Pulau Lomblen/*Island* Lomblen	1.266,0
06. Pulau Adonara/*Island* Adonara	518,8
07. Pulau Flores/*Island* Flores	14.231,0
08. Pulau Solor/*Island* Solor	266,2
09. Pulau Sumba/*Island* Sumba	11.040,0
10. Pulau-pulau lainnya/*Other islands*	1.923,6
Nusa Tenggara Timur/*East Nusa Tenggara*	47.349,9

Keterangan : *) Hanya wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Note : *) Only the area included in the Province of East Nusa Tenggara.

For the inhabitants of East Nusa Tenggara, the above-mentioned land extent is a basic capital for living.

The kind of soil includes not only the productive but also the critical; the latter is due to climatic influence.

Areas potential to develop for agriculture and industry among others are: Basikama, Belu District; Kodi, West Sumba District; Mamboro, West Sumba, Mbai, Ngada District, Flores Island and some others.

Climate

The Province of East Nusa Tenggara has a dry climate affected by 'muson' wind. Short rainy season takes place from December to April, while the dry one generally from May to November.

Average air temperature is marked with a maxmum of 39°C and a minimum of 20.4°C and average rainfall approximately 1,164 mm with a number of days totalling 71. During a year the rain then falls for 3 months, while the other 9 months are the period of the dry season.

The spread of rain among regions ranges from 1,000 mm to 4,000 mm, and this can be specified as follows:

- *West Flores, inclusive of Manggarai and Ngada areas, receives rainfall totalling 3,849 with the average of 320 mm per month and the period of 254 days in 1980. It indicates that these areas can be categorized as the rainy part and therefore are very suitable for agriculture and plantation of relatively short life.*
- *East Flores, inclusive of Sikka and Ende, is the dry part which annually receives rainfall totalling 1,711 with the average of 142 mm per month and the period of 184 days.*
- *Timor, inclusive of its islands, and Sumba belong to the dry areas, especially West Sumba. In spite of their very restricted utility for agricultural purpose, they have relatively very wide pasture.*

Geology

From the temporary investigation, it can be concluded that the Province of East Nusa Tenggara contains various deposits of minerals and other energy resources. Nearly 100 locations in this territory are composed of minerals and natural energy resources.

Besides the above deposits, earth energy resources/fueloil are discovered in Sumba, Timor and along the coast of East Flores. Sunch big rivers as No Elmina, Noilbinain and Kambaniru can also be developed as considerable energy resources.

On the whole, minerals and natural energy resources found in the Province of East Nusa Tenggara include Gips, Kaolin, Limestone, Clay, Asbestos, Iron Sands, and some vital minerals such as Ferrum, Plumbum, Mangaan, Aurum, Zincum and Argentum.

The kinds of strategic minerals, especially Cuprum, Uranium, Nikkel, etc are mostly found around West Sumba, Riung, Serapa, Lomblen, Alor, Arapupu, Bubur Loran, Camplong, Amarasi and Tonini. It is also necessary to realize that earth heat resources exist in nearly all Districts of Flores Island.

The locations of Aurum very potentially to develop include areas around Maubesi, Kefa Mountains, Parewatana land, Katikutana, Noilbijeli, Noilnisnoni, Noilbisiam, Naeteke, Amfoang, Naunbaun and Taupukan land; while energy material like special Iron Sands is only discovered in Alor Islands.

disi tanah yang ada serta kondisi hutan dan lahan kering, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang cukup berat untuk pembangunan, khususnya untuk melestarikan lingkungan hidup dan kepentingan produksi.

2. Penduduk dan Kepadatannya

Menurut hasil SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) tahun 1985, jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.029.061 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 64 jiwa per km². (Lihat Tabel I—3)

Sementara hasil Sensus Penduduk ta. un 1980 adalah 2.737.166 jiwa dengan kepadatan rata-rata 55 jiwa per km². Dari jumlah tersebut 45,6% berdiam di daerah Kepulauan Flores, sedangkan selebihnya yaitu 36,8% mendiami daratan Pulau Timor dan sekitarnya. Kemudian 13% berada di Pulau Sumba dan selebihnya berada di Alor sebanyak 4,6%.

Tingkat pertambahan penduduk rata-rata menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Pada periode tahun 1930 — 1961 angka kenaikan sebesar 1,24%, periode 1961 — 1971 sebesar 1,55% dan periode tahun 1971 — 1980 angka kenaikan menjadi 1.98% per tahunnya.

Dari perincian jumlah penduduk dan kepadatannya berdasarkan daerah Tingkat II, dapat diketahui bahwa yang paling padat penduduknya adalah Kabupaten Sikka dengan tingkat kepadatan 150 jiwa per Km². Sedang yang paling sedikit penduduknya bila dibanding dengan luas wilayahnya adalah Kabupaten Sumba Timur, dengan kepadatan penduduk 16 jiwa per Km².

Berdasarkan data kependudukan seperti diungkapkan diatas bagaimana upaya selanjutnya agar penyebaran penduduk agak lebih merata di daerah-daerah tingkat II. Hal ini dimungkinkan karena faktor potensi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya masing-masing menunjukkan perbedaan yang cukup berarti, baik ditinjau dari sumber alam, keperluan manusia, tingkat kesuburan tanah dan lain sebagainya.

Dengan kecendrungan pertambahan penduduk yang semakin tinggi, maka hal ini senantiasa akan merupakan gelombang-gelombang kemelut dan menekan sendi-sendi lingkungan manusia. Hal ini disebabkan karena keperluan akan makanan, pakaian, papan, pendidikan serta berbagai fasilitas lainnya harus dilipatgandakan dengan cepat untuk mengejar kenaikan tersebut. Sedangkan sumber daya alam yang mendukung keperluan manusia masing-masing memiliki keterbatasan.

Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk yang terbesar (± 48%) terdapat pada Kabupaten-kabupaten Manggarai, Sikka, Ende dan Belu. Bila dilihat dari segi kepadatan rata-rata, maka Kabupaten Sikka, Ende dan Belu merupakan daerah-daerah yang terpadat dengan kepadatan 88 jiwa per Km².

Jumlah angkatan kerja (sensus 1971) meliputi 54,6% dari jumlah penduduk umur 10 tahun ke atas atau 35,0% dari jumlah seluruh penduduk, lebih kurang 823.855 orang. Angkatan kerja ini tersebar pada sektor pertanian 64,5%, sektor industri 7,2% dan sektor jasa meliputi 28,3%. Berdasarkanm sensus 1971 dari usia 10 tahun atau lebih, 70% merupakan kelompok yang tidak pernah sekolah, 28% tamat sekolah dasar, 1,7% tamat sekolah menengah, 0,2% berpendidikan akademi dan perguruan tinggi.

Dilihat dari sektor-sektor kegiatan atau jasa, maka sektor-sektor pertambangan dan keuangan merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja. Berdasarkan hasil survei penyebaran tenaga kerja di daerah tersebut, tenaga kerja yang ada di sektor pertambangan hanya sebesar 0,02%, selanjutnya di sektor keuangan sebesar 0,07%.

Diperkirakan jumlah penduduk yang sudah dapat bekerja sebesar 931.045, yaitu antara usia 10 sampai 75 tahun lebih. Dari jumlah tersebut sekitar 786.316 mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian, selebihnya bekerja pada sektor industri, pertambangan, bangunan, perdagangan, keuangan dan sektor jasa.

Dari gambaran dominasi sektor pertanian ini dapat disimpulkan bahwa ketergantungan Propinsi Nusa Tenggara Timur terhadap tanah dan air sebagai obyek usaha pertanian sangat tinggi. Tetapi timbul persoalan, apakah pemanfaatan alam dan tanah ini cukup mampu meningkatkan kehidupan penduduk Nusa Tenggara Timur.

3. Pendapatan Regional

Kontribusi sektor pertanian, perdagangan dan pemerintahan masih mendominir produk domestik regional bruto Nusa Tenggara Timur dari tahun dari tahun ke tahun. Dominasi sektor pertanian yang lebih dari 64% atas **harga yang berlaku** dan dihubungkan dengan angka penyebaran tenaga kerja sektor tersebut juga besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi Pro-

Vegetation

The soil condition of vegetation in the Province of East Nusa Tunggara is usually in the form of savanna - grassy plain having many trees.

The trees mostly prevailing in this area include Sandalwood Akasia, Kaswari, Eucalyptus, Palmyra-palm, etc.

Seen from the condition of forest spread by its sort, the Province of East Nusa Tenggara only has 20.82% of the overall area, while the rest contain primary and secondary forests.

To acquire more vivid description, it is then necessary to know that Timor Island has a sufficiently wide range of forests, ie 400,000 Ha, while Sumba only 183,000 Ha. Based on the condition of existing soils, forest and dry cultivated land, East Nusa Tenggara can be categorized as a territory hard enough for development, chiefly living environment preservation and production necessity.

2. Population and its Density

On the basis of Inter-Census Population Survey conducted in 1985, the population of East Nusa Tenggara reached the total of 3,029,061 inhabitants with the average density of 64 heads per km². See Table I - 3.

Tabel / *Table I — 3*

JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAERAH DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KABUPATEN 1985

POPULATION TOTAL, AREA EXTENT AND DENSITY OF INHABITANTS PER DISTRICT — 1985

Kabupaten / *District*	Jumlah Penduduk / *Population Total*	Luas Daerah (Km2) *) / *Area Extent (Km2)* *	Kepadatan Penduduk Per km2 / *Density of Inhabitants/Km2*
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sumba Barat	263.826	4.051,9	65,1
02. Sumba Timur	138.897	7.000,5	19,8
03. Kupang	465.856	7.338,6	63,5
04. Timor Tengah Selatan	327.325	3.947,0	82,9
05. Timor Tengah Utara	148.087	2.669,7	55,5
06. Balu	202.236	2.445,6	82,7
07. Alor	132.201	2.864,6	46,1
08. Flores Timur	267.295	3.079,2	86,8
09. Sikka	236.691	1.731,9	136,7
10. Ende	212.349	2.046,6	103,7
11. Ngada	188.353	3.037,9	62,0
12. Manggarai	445.945	7.136,4	62,5
Jumlah / Total	3.029.061	49.879,98	64,0

Keterangan: *) Sumber dari Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Timur.
**) Information given by Agrarian Directorate of the Province of East Nusa Tenggara.*
Sumber : Survei Penduduk Antar Sensus 1985.
Source : Inter-Census Population Survey of 1985.

The result of Population Census in 1980 indicated that the population total at that time was 2,737,166 heads, while the average density 55 heads per km². This was specified: 45.6% living in Flores Islands, 36.8% in Timor Island and its surroundings, 13% in Sumba Island and the rest of the whole total (4.6%) in Alor.

The average population growth level has pointed out a sufficiently substantial increase. It was recorded that in the period of 1930-1961 the annual increase was 1.24%, then became 1.55% in 1961-1971, and went up again to be 1.98% in 1971-1980.

From the details of population total and its density acquired in districts, it was discovered that the district having the densest population was Sikka (150 heads/km²), while East Sumba had the least population (16 heads/km²).

Based on the above-mentioned data, it is then essential that the way of how to make the population of districts spread more equitably be found out. It is not impossible to carry this out, since potential factors between one district to another show significant differences, either viewed from natural resources, human needs, the fertility of land or others.

The trend of population increase will certainly be a serious problem, for it might affect human atmosphere badly. This is due to the demands for food, clothing, housing, education and other facilities, which willy-nilly rise, too. Basides, the natural resources supporting the human needs possess certain restrictions.

Population Spread

The highest level of population spread occurs in the districts of Manggarai, Sikka, Ende and Belu. It is discovered that Sikka, Ende and Belu are the

pinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat dipengaruhi oleh kemajuan sektor pertanian.

Dari data yang ada, sektor pertanian merupakan sektor terbanyak yang dapat membentuk produk domestik regional bruto di Nusa Tenggara Timur, yaitu bernilai sebesar Rp194.936 juta, atau 64,47% atas harga yang berlaku. Kemudian berturut-turut pemerintahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, industri, sewa rumah, bangunan, jasa-jasa, bank dan lembaga keuangan lainnya, listrik, gas dan air minum serta terakhir sektor pertambangan dan penggalian.

Andil sektor pertanian bagi pembentukan produk domestik regional bruto Nusa Tenggara Timur, juga ditunjukkan dengan angka andil kabupaten potensial sektor pertanian.

Kabupaten Manggarai, Sumba Barat dan Kupang merupakan kantong pertanian Nusa Tenggara Timur, yaitu Kupang memberikan andil sebesar 20,70%, Manggarai 14,11% dan Sumba Barat sebesar 8,46%.

4. Agama

Masyarakat propinsi ini sebagian besar memeluk agama Katholik, kemudian berturut-turut Kristen Protestan dan Islam.

Prosentase jumlah pemeluk agama dapat diperinci sebagai berikut:

— Katholik	:	1.443.358 jiwa (50%)
— Protestan	:	813.889 jiwa (40%)
— Islam	:	229.394 jiwa (10%)
— Hindu	:	1.748 jiwa
— Budha	:	339 jiwa

Walaupun secara prosentase jumlah agama Katholik dan Protestan menduduki angka pertama dan kedua, tetapi partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan di luar agamanya menunjukkan gambaran positif.

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup beragama, telah dilakukan dialog intern pendidikan agama, penerangan serta pembinaan generasi muda. Disamping itu, kehidupan umat beragama berada dalam keadaan serasi dan harmonis walaupun komposisinya tidak seimbang.

Bahasa

Di Nusa Tenggara Timur sedikitnya terdapat 15 bahasa, sedangkan kalau dibedakan dalam dialek dan sub dialek terdapat lebih dari 40 bahasa.

Di Kepulauan Flores, yaitu kepulauan Nusa Tenggara Timur bagian Utara terdapat beberapa macam bahasa seperti: bahasa Manggarai, Ngada, Ngereo, Ende, Lio Sikka, Larantuka, Lembata, Solor dan berbagai anak bahasa lainnya.

Selain berbagai macam bahasa seperti yang terdapat di kepulauan Flores, juga masih banyak lagi terdapat beraneka bahasa lainnya yang ada di pulau-pulau kecil.

Di Kabupaten Belu terdapat 3 bahasa yang cukup terkenal seperti: bahasa Belu/Tetun, Buna dan Bahasa Kenak

Di Pulau Sabu	:	Bahasa Sabu
Di Pulau Rote	:	Bahasa Rote
Di Pulau Semau	:	Bahasa Helong
Di Pulau Timor bagian Barat	:	Bahasa Dawan
Di Pulau Alor	:	Bahasa Alor

5. Potensi Wilayah

Keadaan Tanah

Dataran rendah yang terdapat di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur hanya sebagian kecil dari luas wilayah. Selebihnya merupakan tanah pegunungan yang curam, berbukit dan banyak bercampur dengan batu-batuan yang mengandung kapur.

Untuk melestarikan tanah-tanah kritis ini hanya mungkin dapat ditanami dengan tanaman perkebunan dan kehutanan. Sedangkan untuk tanaman pangan yang bisa ditanami luasnya terbatas sekali.

Tingkat kesuburan tanah secara keseluruhan tidak merata. Di daerah-daerah yang cukup curah hujannya keadaan tanahnya cukup subur. Sedangkan untuk daerah-daerah yang keadaan tanahnya banyak bercampur dengan batu karang mengakibatkan daerah ini menjadi kering dan kritis.

Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor terbesar yang banyak menyerap tenaga kerja. Sedangkan lainnya banyak berusaha di bidang industri, sektor jasa dan lain-lain.

Kegiatan di sektor pertanian meliputi beberapa kegiatan seperti: bersawah, peternakan dan perkebunan. Pada bagian tanah yang mengan-

densest areas (88 heads/km²).

A census done in 1971 indicated that the total of manpower was 54.6% of the population above 10 years old or 35.0% of the whole population - approximately 823,855 heads. This was specified: 64.5% in agricultural sector, 7.2% in industrial sector and 28.3% in service field. It was also resulted from the aforesaid census that 70% of the manpower concerned was a group of uneducated people, 28% from primary school, 1.7% from secondary school and 0.2% from academy and higher learning.

Mining and finance are the sectors absorbing the least work force - the former utilizes 0.02%, while the latter 0.07%.

It is estimated that the total of people able to work is 931,045 the ages of whose range from 10 to 75 or above. From this total, 786,316 deal with agricultural sector, while the rest in industry, mining, building, trade, finance and service.

Viewed from the domination of agriculture, it is concluded that the Province of East Nusa Tenggara is extremely dependent upon soil and water. Yet, it is still in question whether the utilization of nature and soil can, sufficiently, enhance the life of East Nusa Tenggara people.

3. Regional Income

The contributions of agricultural, commercial and governmental sectors still, from year to year, dominate the gross regional domestic product of East Nusa Tenggara. The domination of agriculture, which is more than 64% on the applied price, and the high number of work force in this sector show that the increase of economic growth in the Province of East Nusa Tenggara is deeply influenced by the progress of agriculture.

On the basis of the available data, agriculture is the most dominant sector for the formation of gross regional domestic product in East Nusa Tenggara - it contributes Rp194,936 million or 64.47% on the applied price, then followed by the sectors of government, trade, transportation and communication, industry, house rental, building, service, bank and other financial institutions, electricity, gas, drinking water, and mining and excavation.

The contribution of agricultural sector to the formation of gross regional domestic product in East Nusa Tenggara is also confirmed by the districts potential for this field.

The districts of Manggarai, West Sumba and Kupang are considered as the agricultural pocket of East Nusa Tenggara - Kupang contributes 20.70%, Manggarai 14.11% and West Sumba 8.46%.

4. Religion

Most of the society of this province adhere to Catholic faith, then Protestant and Muslim.

Below is the calculation of religion adherents:

– Catholicism	:	*1,443,358 people (50%)*
– Protestantism	:	*813,889 people (40%)*
– Islam	:	*229,394 people (10%)*
– Hinduism	:	*1,748 people*
– Buddhism	:	*339 people.*

Notwithstanding the percentage of Catholicism and Protestantism holds the first and second levels, the participations of their adherents in activities unrelated to the faiths show a positive picture.

Various efforts such as internal dialog, information and younger generation promotion have been made so as to enhance the concord of religious life, which so far is harmonious though its composition is not in equilibrium.

Language

There are 15 languages in the Province of East Nusa Tenggara. Nevertheless, should this total be based on dialect and sub-dialect, it will become 40 or more.

In Flores Islands, there are various languages such as Manggarai, Ngada, Ngereo, Ende, Lio Sikka, Larantuka, Lembata, Solor and other sub-languages. Besides, many others exist in small islands.

3 languages famous enough in the District of Belu are Belu/Tetun, Buna and Kenak.

Sabu Island	:	*Sabu Language*
Rote Island	:	*Rote Language*
Semau Island	:	*Helong Language*
The west part of Timir Island	:	*Dawan Language*
Alor Island	:	*Alor Language*

dung batu-batuan sering kali menimbulkan hambatan di dalam proses pengoahan tanah untuk ditanami. Oleh karenanya kegiatan mencukil batu yang terdapat dalam tanah biasanya dikerjakan, yang selanjutnya setelah batu-batuan terangkat, barulah ditanami dengan tanaman pangan.

Di wilayah pedalaman Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya cara cocok tanam dilakukan masih sangat sederhana. Oleh sebab itu hasilnya pun belum memadai dengan keperluan.

Kegiatan di sub sektor perkebunan terutama ditekankan pada tanaman perdagangan/perkebunan yang umumnya berumur panjang (tanaman keras). Selain untuk mencapai tujuan ekonomis juga sekaligus memberikan manfaat ekologis karena tanaman keras dapat mencegah erosi memperbaiki sifat tanah serta meningkatkan mutu lingkungan hidup.

Sub sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur cukup berkembang, sebab hampir setiap penduduk di pedalaman memelihara hewan ternak. Hewan ternak yang banyak dipelihara yaitu sapi, kuda, kambing dan hewan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur banyak terdapat savana disamping hutan.

Areal hutan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur cukup luas serta perlu pengelolaan serius. Karena hampir seluruh areal hutan di propinsi termasuk hutan kritis. Sebagai contoh, untuk hasil hutan alam yang terkenal dari Pulau Timor adalah kayu Cendana, sehingga pulau tersebut sering pula dijuluki sebagai Pulau Cendana. Kayu Cendana ini selain minyak cendana yang pada umumnya diekspor, sebagai bahan kerajinan tangan seperti: kipas, patung dan lain sebagainya. Selain hutan alam Cendana terdapat juga hutan alam Eucaliptus atau disebut orang pohon kayu Putih.

Disamping itu pulau Timor terkenal pula dengan hasil ternaknya yakni Sapi yang juga dieksport ke luar negeri.

Perhubungan dan Pariwisata

Kondisi perhubungan darat ditandai belum adanya jaringan jalan raya yang baik, terutama dari pusat perkotaan dengan daerah pedalaman lainnya. Ini disebabkan hampir seluruh permukaan tanah terdapat tebing-tebing yang curam, kondisi yang kurang baik. Keadaan semacam ini mengakibatkan jalan-jalan di seluruh propinsi ini hanya bisa dilalui pada musim kemarau. Sebaliknya bila musim hujan, jalan semacam ini menjadi licin dan sulit dilalui.

Kegiatan di sub sektor perhubungan laut masih belum begitu lancar. Hanya pelabuhan Tenau yang mempunyai fasilitas memadai. Dermaga ini dirancang untuk standar kapal yang berbobot 10.000 DWT dengan beton vertikal 3 ton/m_2. Di luar pelabuhan Tenau dermaga yang ada hanya bersifat darurat.

Sektor perhubungan yang sudah nampak maju adalah perhubungan udara. Pelabuhan El Tari, bisa didarati pesawat jenis Fokker 28. Sedang pelabuhan udara perintis Labuan Bajo, penggunaannya belum memadai.

Potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur berupa atraksi alam, seperti Danau Tiga Warna Kelimutu di Ende dan panorama yang indah serta atraksi budaya seperti: kampung-kampung tradisional, benda-benda peninggalan purbakala, kesenian (tari, musik dan lagu) dan beberapa atraksi budaya khusus.

6. Kesenian Daerah

a. Tari Kebalai

Tari ini termasuk jenis tarian yang sangat digemari oleh penduduk pulau Roti. Tari ini mudah sekali untuk dipelajari, termasuk orang-orang yang bukan suku bangsa Roti. Jenis tarian ini sering diadakan pada malam terang bulan serta mencapai klimaksnya pada waktu bulan purnama. Tarian ini pada dasarnya bukan diadakan dalam suatu keramaian.

b. Tarian Longe (Ronggeng)

Tarian ini biasanya ditarikan oleh gadis-gadis bersama-sama dengan laki-laki. Tari ini ada yang lemas. Alat-alat musiknya ialah gong dan Sasando. Lagu-lagu yang dimainkan ke Sasando itu banyak yang sentimentil.

c. Tarian Fati

Tarian ini sangat hidup sekali, biasanya ditarikan bila ada pesta atau perayaan-perayaan. Alat-alat musiknya ialah gong dan tambur. Lagu dan irama untuk fati ini sangat cepat sekali. Yang memainkannya hanya pria/laki-laki saja. Sambil menari (fati) memegang kelewang/pedang. Karena cepatnya irama dalam fari ini termasuk tarian yang sangat singkat waktunya.

5. Territorial Potensial

Condition of Soil

East Nusa Tenggara only has a small number of lowland plains. The rest of the whole territory are covered with steep, hilly mountainous soils containing limestones.

In order to preserve such critical soils, the possibility is by executing horticulture and forestry programs, since food plants can grow in very limited spots.

The condition of soil fertility is not equilibrium in the overall territory. The areas having sufficient rainfall own fertile enough soils, while those containing rocks result in arid and critical soils.

Agriculture

It is agricultral sector that uses the most total of manpower - compare to such sectors as industry, service, etc.

Activities in agriculture include rice growing, animal husbandry and plantation.

In stony areas, hindrance will often arise while they are cultivated for planting purposes. Therefore, stones are usually removed before the process of planting is conducted.

In the inner parts of East Nusa Tenggara, the ways applied for farming are still very simple. On this account, the crops achieved are not sufficient yet for the need.

Plantation activities are chiefly emphasized on long-lived commercial/horticultural plants (hard plants). Besides intended for economic aims, the hard plants are purposed to give ecological benefit, since they can prevent erosion, improve soil condition and intensify the quality of living environments.

The development of animal husbandry in this province is so far so good, for almost every inhabitant in the inner areas owns breeding animals. The kinds of animals bred include cow, horse, goat, etc. The reason is that the territory of East Nusa Tenggara is mostly filled with savannas and forests.

Forests in this province have an adequately wide area. Yet, realizing that most of them area categorized as critical, they have to be managed seriously. A famous product of natural forest in Timor Island is sandalwood. Consequently, this island is frequently called as Cendana Island (cendana = sandalwood). Besides producing oil generally exported, the sandalwood is used for handicrafts like fan, statue and so on. Another natural forest is ***Eucalyptus*** *forest.*

Timor Island is also famous for the product of cow breeding, which is exported, too.

Communication and Tourism

The condition of land communication is marked wiht the absence of good highways, especially from town centres to the inner areas. This is due to the existence of bad, steep slopes on the land surface. The effect of this kind of circumstance is that the roads in the entire territory can be passed in summertime only, for they are slippery and difficult to pass in the rainy season.

Activities in sea communication do not run well yet. It is only Tenau Harbour that has adequate facilities. This harbour is made of vertical concrete of 3 tons/m² and programmed for the ships weighing 10,000 DWT. The other harbours are used for emergency only.

Air communication has shown a good progress. El Tari Airport can be used for the landing of Fokker 28. On the other hand, Labuan Bajo Airport is not usable enough yet.

The potency of tourism of East Nusa Tenggara is in the form of natural charms such as Three Colours Lake of Kelimutu in Ende, beautiful panorama and cultural attractions - traditional villages, ancient things, arts (dance, music and song) and some specific attractions.

6. Regional Arts and Culture

a. Kebalai Dance

This kind of dance, which is the favourite of the people of Roti Island, is easy to learn, either by the aboriginals or outsiders. It is often demonstrated on the night of full moon only, and not in public exhibitions.

b. Longe Dance (Ronggeng)

In general this dance is conducted by girls and boys and in flexible motions. The musical instruments following it are gong and Sasando. The latter usually produces sentimental songs.

d. Tarian Cerana

Tari ini berasal dari Pulau Timor. Para gadis membawakan tarian ini melukiskan cara-cara khas masyarakat di Pulau Timor dalam menyambut tetamu yang datang berkunjung kerumahnya. Cerana yang terlukis indah ini berisikan sirih dan pinang yang kemudian dipersembahkan kepada tamu sebagai tanda penghormatan dan ucapan selamat datang.

e. Tarian Tambur

Tari Tambur adalah tari rakyat yang sering disebut tari kegembiraan dengan dasar gerak yang diambil dari tari "Liku Roi", suatu jenis tari yang berasal dari daerah perbatasan antara Timor Indonesia dan Timor Portugis. Tarian ini biasanya dipentaskan pada upacara adat seperti pesta-pesta perkawinan atau ulang tahun.

7. Pemerintahan

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dibentuk tanggal 20 Oktober 1958 dengan Undang-undang No 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No 14/A tahun 1978 yang dijiwai surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Mei 1975 No Pem 7/5/1 maka di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur telah dibentuk 2 (dua) Wilayah Pembantu Gubernur : Pembantu Gubernur Wilayah Utara dan Pembantu Gubernur Wilayah Selatan. Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Wilayah Utara meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Alor, Flores Timor, Sikka, Ende dan Manggarai.

Sedangkan Wilayah Kerja Pembantu Gubernur Wilayah Selatan meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba Timur dan Sumba Barat. Di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur telah dibentuk 3 (tiga) Wilayah Kerja Pembantu Bupati. Masing-masing: Pembantu Bupati Kupang untuk Rote/Ndao, Pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata, Pembantu Bupati Manggarai bagian Barat di Labuan Bajo.

Kota Administratif Kupang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 18 September 1978 telah menunjukkan perkembangan pesat, sehingga perlu penanganan yang lebih berencana. Hal ini mengingat kota Kupang sekaligus berfungsi sebagai Ibu kota Propinsi, Ibu kota Kabupaten dan Kota Administratif yang juga merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan. Kebijaksanaan yang ditempuh dalam penempatan para Camat, Kepala Perwakilan Kecamatan dan Koordinator pemerintahan kota (Kopeta) diprioritaskan pada sarjana/sarjana muda khususnya yang telah memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman. Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 98 Kecamatan, 40 perwakilan, 40 perwakilan Kecamatan dan 10 Kopeta, jabatan-jabatan tadi pada 1 Maret 1983 diduduki oleh 27 orang sarjana lengkap, 121 orang sarjana muda dan hanya 8 jabatan yang diisi oleh pejabat karier yang bukan sarjana.

Pemerintahan Daerah

Sesuai Undang-undang No 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, salah satu fungsi pokok, tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah mengadakan Koordinasi atas segala kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan di daerah. Baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasannya.

Usaha kegiatan pelaksanaan koordinasi ini antara lain dilakukan dengan mengadakan rapat kordinasi baik yang dilakukan berkala ataupun insidentil, dengan para Bupati Kepala Daerah dan/atau Camat se Nusa Tenggara Timur yang sebagai aparatur dekonsentrasi berada di bawah Gubernur Kepala Daerah. Disamping itu mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan instansi-instansi vertikal dan/atau pertemuan terbatas antara Gubernur Kepala Daerah dengan instansi vertikal yang bersangkutan.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Nusa Tenggara Timur lebih diarahkan kepada terbinanya ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Administratif pemerintahan, serta peningkatan dan pemekaran status wilayah administratif pemerintahan secara efisiensi.

Susunan keanggotaan DPRD Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai hasil Pemilu 1982, terdiri dari Fraksi Golongan Karya 31 wakil, Fraksi Demokrasi Indonesia (FDI) 1 wakil, dan Fraksi ABRI 8 wakil, dan selama Pelita III telah ditetapkan 79 buah Peraturan Daerah.

c. Fati Dance.

This dance is very bright and usually demonstrated in parties and commemorations. It is only done by men with the instruments of gong and drum and with fast rhythm and song. While dancing, the demonstrators hold short swords. The rhythm is so fast that the time consumed by this dance is very brief.

d. Cerana Dance

This dance originated from Timor Island and is performed by girls to show the special ways of the people in this island in receiving guests coming to their houses. The beautifully-painted cerana (sirih-dish) is filled with sirih and pinang and then dedicated to the guests as a sign of welcome and respect.

e. Tambur Dance

This one is said to be the people's dance and often called as the dance of happiness. Its motions are based upon Liku Roi dance - a dance originated from the border area between Indonesian Timor and Portuguese Timor. It is usually performed in cultural ceremonies, such as wedding and birthday.

7. *Public Administration*

The Province of East Nusa Tenggara was formed on October 20, 1958 by Law No 64 of 1958 - concerning the formation of the Provinces of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara.

Based on the Governor's Decree of East Nusa Tenggara No 14/A of 1978 and based on the Domestic Affairs Minister's Consent No 7/5/1 of May 5, 1975, 2 Govemnor's Auxiliary Areas (North and South) were established in East Nusa Tenggara. The North includes the Districts of Alor, East Flores, Sikka, Ende and Manggarai, while the South Area includes the Districts of Kupang, Southern Central Timor, Northern Central Timor, Belu, East Sumba and West Sumba.

3 Auxiliary Districts established in this province are; the Bupati's Auxiliary District of Kupang (in Rote/Ndao), the Bupati's Auxiliary District of East Flores (in Lembata) and the Bupati's Auxiliary District of West Manggarai (in Labuan Bajo).

The Administrative Town of Kupang, which was formed under the Government Regulation No 2 of 1978 dated on September 18, 1978, has so far shown a so fast progress that it needs handling and planning more. This is because of the fact that Kupang functions not only as the Capital of Province but also as the Capital of District and is the centre of public administration, trade and education.

The priority of filling the posts of Head of Sub-district, Head of Representative Sub-district and Urban Administration Coordinator is given to full-/under-graduates, specifically those that have had qualified ranks and experiences. The Province of East Nusa Tenggara, which includes 98 Sub-districts, 40 Representative Sub-districts and 10 Urban Administration Coordinators, had 27 full-graduates, 121 under-graduates and 8 career officers (non-graduates) holding these posts - on the 1st of March 1983.

Regional Administration

In accordance with Law No 5 of 1974, which describes the Principles of Regional Administration, one of the main functions of a Governor is instituting coordinations on any conduction of development duties in his area, either during the period of planning, performance or supervision.

The coordinations are carried out through periodical or incidental meetings with Bupatis and/or Heads of Sub-districts, whose authorities are under the control of Governor. Besides, horizontal and vertikal coordinations should also be made.

The policy of Regional Administration in promoting administrative areas of East Nusa Tenggara is aimed at creating an orderly and safe circumstance and flourishing and enhancing the territorial status efficiently.

The membership of the Provincial House of Representatives of East Nusa Tenggara resulting from the 1982 General Electionis composed of Golkar Fraction (31 people), Indonesian Democratic Fraction (1 person) and Armed Forces Fraction (8 people). During the Five Year Development III, 79 Regional Regulations were established.

Pemerintahan Desa

Awal dari pembentukan desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan ikatan geneologis, desa sebagai persekutuan ikatan sosial, ikatan suku, agama, adat istiadat dan sebagainya.

Jumlah desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan adanya ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, maka di Propinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 97 buah kelurahan dan 1.626 desa.

Dalam pemerintahan kelurahan dan desa juga terdapat LKMD sebagai suatu kesatuan struktur yang berfungsi menyukseskan perkembangan pembangunan di kelurahan dan desa. Untuk ke 97 kelurahan yang ada, telah diangkat sebagai pegawai negeri untuk menduduki 7 (tujuh) jabatan pada setiap kelurahan. Seorang kepala kelurahan, sekretaris kelurahan dan 5 (lima) orang kepala urusan kelurahan. Dari jumlah tersebut telah diangkat 593 orang pegawai negeri. Khusus bagi Kepala Desa dan perangkatnya telah diberikan tunjangan khusus penghasilan Kepala Desa dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sedang tunjangan tetap yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II belum memungkinkan untuk diberikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 60 tahun 1983, maka untuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1979, telah dibentuk desa/kelurahan percontohan 141 buah.

Pelaksanaan Pemilu tahun 1982 di Nusa Tenggara Timur meliputi 5571 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Partisipasi pemilih dalam pemungutan suara cukup positif, terlihat dengan jumlah pemilih sebanyak 1.499.363 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 1.488.561 orang (± 99,28%). Lihat Tabel I-4.

8. Sistem Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan sesama manusia. Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan sesamanya, agar dapat memuaskan keperluan kehidupan sebagai mahluk dan sebagai manusia yang memiliki rasa, rasio dan iman. Hubungan ini didasarkan pada hak dan kewajiban yang mengikat dirinya dan keluarga serta masyarakat disekitarnya. Pada suatu hak dan kewajibannya itu dapat amat banyak jumlahnya, sehingga hubungan-hubungan yang mengikatnya pun amat banyak. Karena kemampuan manusia terbatas maka ia secara sadar maupun tidak, membatasi ataupun dibatasi hubungan-hubungannya. Pembatasan hubungan itu berpengaruh secara timbal balik ataupun secara organis dengan jumlah hak dan kewajiban yang dapat dinikmati dan dilaksanakan

Prinsip Kekerabatan

Hubungan antara individu dan masyarakat menentukan posisi dan peranan individu serta masyarakat dalam menentukan jenis kekerabatan yang khas di dalam suatu daerah atau wilayah. Penduduk Sabu, Rote dan Timor menikmati hidup, sosial budaya akibat penyesuaian diri pada lingkungan hidup, mengakibatkan sesuatu perbedaan respons hidup mereka, yang membedakan hidup sosial budaya mereka. Kecenderungan pada keseragaman dan kebakuan hidup sosial budaya itu tidak menghilangkan keanekaan yang dibanggakan dan dinikmati.

Karena itu terdapat beberapa sistem kekerabatan. Akan tetapi keanekaan itu tidak ekstrim karena adanya unsur pengaruh mempengaruhi. Prinsip kekerabatan yang ada adalah: Prinsip Patrilineal dan Prinsip Matrilineal.

Prinsip Patrilineal

Dalam kalangan kelompok penganut prinsip patrilineal semua anak mengikuti ayah dan menjunjung nama keluarga ayah, terutama di daratan Timor dan Rote. Keluarga pria berkewajiban melakukan pinangan resmi dengan membawa satu botol sopi dan uang perak Rp10,- diserahkan kepada ayah gadis yang hendak dipinang untuk diminum bersama-sama dengan anggota keluarga. Uang itu diserahkan kepada ayah dan diteruskan kepada ibu untuk disimpan. Tempat menetap bagi pasangan mempelai baru diatur menurut atau utrolokal. Prinsip Patrilineal ini dianut di Wilayah bekas Swapraja Amanuban dan bekas Swapraja Amanatun, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Rural Administration

The formation of a village was originally based on such engagement factors as genealogy, social, tribe, religion, culture, etc.

The Province of East Nusa Tenggara has 97 kelurahan (lowest administrative unit in urban area) and 1,626 villages. These totals are regulated under Law No 5 of 1979 - the law which concerns Rural Administration.

A structural unity called Rural Community Reselience Institution is formed in village or kelurahan in order to make its development program be a success. Each of the 97 kelurahan has appointed 7 people to be Civil Servants - 1 head, 1 secretary and 5 personnels for kelurahan affairs. This total of kelurahan results in 593 Civil Servants. Head of Village is given a special allowance the fund of which is derived from the State Income and Expenditure Budget, while the fixed allowances from Provincial and District Income and Expenditure Budget are not possibly given yet. Under the Instruction of Domestic Affairs Minister No 60 of 1983, 141 units of sampling village/kelurahan have been made so as to speed up the executions of Rural Administration - based on Law No 5 of 1979.

The performance of the 1982 General Election involved 5,571 Election Spots. The participations of electors were positive enough. From the total of 1,499,363 electors, 1,488,561 (± 99.28%) used their rights in voting. See Table I - 4.

8. System of Relation

Human beings, as social creatures, will be impossibly able to live without connecting one another, since they need share their feelings, thoughts and spiritual mainstay. Then a relationship is a must. It should be based on the rights and duties engaging themselves, their families and the societies around them. Because of the fact that their abilities are limited, consciously or unconsciously they restrict or are restricted by their relationships.

Principle of Relation

The connection between an individual and the society to which he belongs determines his position and the role he has in them. The people of Sabu, Rote and Timor enjoy their social cultural lives resulting from the adaptationto living environments. Consequently, they have different ways of lives from each other.

Even though there are several systems of relation, they are not extreme. This is due to the existence of mutual influences. The principle of relation includes Patrilineal and Matrilineal Relations.

Patrilineal Principle

Here all children follow their father and honour the father's families, especially those living in Timor and Rote. The man's families are supposed to propose marriage officially to a girl by carrying a bottle of gin and a coin of Rp10 to be handed to her father. The gin is drunk up together by the families,while the coin accepted by the father is then transferred to the mother to be kept. The accomodation for the new married couple is arranged under the utrolocal tradition.

This Patrilineal Principle is followed by the people of Amanuban (ex Self-Government) and Amanatun (ex Self-Government), the District of Southern Central Timor.

Matrilineal Principle

The followers of this principle use a very complicated way. The wedding is begun by a proposal and negotiation which are done step by step and in complexity and variety by sacrificing the property and feeling of the man's side. Besides the own parents, the families, "outsiders" and members of traditional management are needed as the witness. The negotiation ranges from three to thirteen phases and is accomplished difficultly. it is a must that the wife and children are taken to the wife's family under the available family conditions. Here the children should obey to the matrilineal law.

Christianity and formal education have so far resulted in no influence on the whole procedure of this marital system.

The followers of matrilineal principle include the people of ex Sombai Realm - Biboki (ex Self-Government), Insana, Miomafo (the District of Northern Central Timor), Malo (the District of Southern Central timor), Northern Belu (the District of Belu) in Rote and Sabu.

In Sabu this principle is slightly moderated because of the tradition of self humbling - the man's side have the initiative of kissing the girl's family

Tabel / *Table I — 4*

KOMPOSISI/JUMLAH KURSI DPRD/ADPRD I/ADPRD II, HASIL PEMILIHAN UMUM 1982 WILAYAH PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

THE MEMBERSHIP OF HOUSE OF REPRESENTATIVES, RESULTING FROM THE 1982 GENERAL ELECTION, THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

No	Prop/Kab/Dati II *Prov/District*	Jumlah ADPR/ ADPRD seluruhnya *Total of House of Representatives/Regional House of Representatives Overally*	ADPR/ADPRD/Parpol Golkar yang dipilih *House of Representatives/ Regional House of Representatives Elected/Political Parti/Golkar*			ADPR/ADPRD yang diangkat *House of Representatives/ Regional House of Representatives Appointed*	
			PPP *Islamic Party*	Golkar *Golkar*	PDI *Indonesian Democratic Party*	ABRI *Armed Forces*	Bukan ABRI *Non-ABRI Non-Armed Forces*
1		3	4	5	6	7	8
1.	DPR PUSAT/*Central House of Representatives*	12	—	12	—	—	—
2.	DPR PROP NTT/*Central House of Representatives of East Nusa Tenggara*	40	—	31	1	6	2
3.	DPRD Kupang/*Distict House of Representatives of Kupang*	40	—	29	2	6	2
4.	DPRD TTS/*District House of Representatives TSS*	29	1	23	—	4	2
5.	DPRD TTU/*District House of Representatives TTU*	20	—	16	—	3	1
6.	DPRD Belu/*District House of Representatives Belu*	20	—	16	—	3	1
7.	DPRD Alor/*Distric House of Representatives Alor*	20	—	16	—	3	1
8.	DPRD Flotim/*District House of Representatives Flotim*	25	—	20	—	4	1
9.	DPRD Sikka/*District House of Representatives Sikka*	22	—	16	2	3	1
10.	DPRD Ende/*District House of Representatives Ende*	20	1	15	—	3	1
11.	DPRD Ngada/District House of Representatives Ngada	20	—	16	—	3	1
12.	DPRD Manggarai/*District House of Representatives Manggarai*	40	—	32	—	6	2
13.	DPRD Sumba Timur / *District House of Representatives East Sumba*	20	—	16	—	3	1
14.	DPRD Sumba Barat / *District House of Representatives West Sumba*	23	—	18	—	4	1

Sumber : PPD I NTT 1982 / ***Source : PPD I NTT 1982.***

Prinsip Matrilineal

Penganut prinsip ini memiliki suatu tata cara perkawinan yang dimulai dengan peminangan dan perundingan perkawinan yang bertahap dan rumit serta bervariasi dengan penuh pengorbanan harta dan perasaan pihak keluarga pria. Selain orang tua kandung, sanak keluarga diperlukan sebagai saksi-saksi yang terdiri dari "orang lain" dan anggota-anggota pemerintahan tradisional pada pelbagai stratifikasi sosial. Selama perundingan yang berkisar antara tiga sampai tiga belas tahap dilalui dengan penuh suka duka. Bagi anak-anak sedikit banyaknya harus tunduk pada hukum berdasarkan matrilineal. Pemboyongan istri beserta anak-anak ke rumah keluarga istri menurut syarat-syarat keluarga merupakan keharusan. Pengaruh agama Kristen dan pendidikan formal belum menggoyahkan seluruh prosedur dan sistem perkawinan ini. Prinsip ini dianut di wilayah bekas kerajaan Sombai yang meliputi bekas Swapraja Biboki, Insana, Miomafo (Kabupaten Timor Tengah Utara), Mollo (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Fatuleu, Amfoang, Kupang, Amarasi (Kabupaten Kupang), Wilayah Belu Utara (Kabupaten Belu) di Rote dan Sabu. Prinsip ini agak diperlunak di Sabu karena adanya kebiasaan perendahan diri, oleh pihak keluarga pria yang mengambil inisiatif **mencium** keluarga wanita untuk menembus jalan buntu perundingan perkawinan.

Prinsip matrilineal sama pelaksanaannya dengan prinsipnya patrilineal. Keluarga pria melakukan pinangan dengan membawa satu botol sopi dan Rp10,- uang perak, secarik kain putih dan seekor ayam jantan. Semua anak mengikuti garis ibu kecuali anak bungsu yang akan kembali kerumah keluarga ayahnya. Anak yang dikembalikan ini

in order to overcome the dead end of wedding negotiation.

The performance is almost the same as that of patrilineal principle. The man's family propose marriage by carrying a bottle of gin, a coin of Rp10, a piece of white cloth and a cock. All children follow the mother's line, except the last one that will return to the father's family. This returned child is named "Civet's Eye" and should obey to the patrilineal law.

This principle is done in Southern Belu (the District of Belu, chiefly in the society of Tetum Tribe residing the Subdistricts of West Malaka, Central Malaka and East Malaka).

The matrilineal principle is influenced by some patriline al factors followed by the people of Southern Belu who have the Dawan Language, and Tetum Language as well. People with these two languages make efforts to stick to their own identity and custom.

9. Marital System

Sort of Marriage

the marriage in Sabu, Rote and Timor is completely exogam. In general it is a simetrical cross-cousin marriage. The similarity and difference in family names are not the matter. The most important thing is that the couple have the status of cross-cousin. Men have more freedom in finding their matches. On this account, there is only a very littly possibility of forced marriage.

Parallel-cousin marriage is a controversial case, which can be tolerated by the family if only it is compulsory and for the sake of family necessity.

dinamakan "Mata Musang". Mata Musang tunduk pada hukum patrilineal dalam rangka hukum matrilineal.

Prinsip ini dianut di Belu Selatan (Kabupaten Belu, khususnya dikalangan Suku Tetum yang mendiami kecamatan-kecamatan Malaka Barat, Malaka Tengah dan Malaka Timur).

Dalam prinsip matrilineal ada pengaruh unsur-unsur prinsip patrilineal yang dianut oleh penduduk Belu Selatan yang berbahasa Dawan (disamping bahasa Tetum). Mereka hidup berdampingan ataupun bercampuran dengan penduduk yang berbahasa Tetum tetapi berusaha mempertahankan indentitas dan hukum mereka.

9. Sistem Perkawinan

Jenis Perkawinan

Perkawinan di Sabu, Rote dan Timor, mutlak exogam. Pada umumnya perkawinan adalah perkawinan cross cousin yang simetris. Persamaan dan perbedaan nama keluarga tidak dihiraukan dalam perkawinan, asal saja menurut perhitungan tradisional biologis, pasangan itu berstatus cross cousin. Pria lebih banyak berkebebasan hingga tingkat tertentu untuk memilih pasangan hidup. Karena itu kecil sekali kemungkinan terjadinya kawin paksa. Perkawinan dengan pararel counsins merupakan perbuatan sumbang, yang hanya dapat ditolerir oleh keluarga jika keadaan terpaksa atau karena kepentingan keluarga perlu dipertahankan. Upacara perkawinan dan pengorbanan keluarga bagi perkawinan tergantung pada prinsip kekerabatan yang dianut. Demikian juga syarat peminangan perundingan tergantung pada jenis prinsip kekerabatan yang dianut. Tingkat hubungan kekerabatan status bakal suami istri, juga terus berpengaruh pada jalannya perundingan perkawinan serta hal-hal yang perlu dilaksanakan oleh pihak keluarga pria.

Mas Kawin

Mas Kawin dan suitor service tidak dikenal menurut ukuran umum. Tetapi pihak keluarga pria patut memberikan sejumlah sirih pinang dalam arti sebenarnya dan dalam artis kiasan. Agar perkawinan itu menjadi syah bagi keluarga dan terang bagi masyarakat luas. Penganut prinsip patrilineal menentukan dengan pasti jumlah uang yang sedikit sekali, jenis minimum, barang dan rumusan bahasa adat yang setingkat dan sederhana bagi sahnya suatu perkawinan dengan segala konsekuensinya.

Sistem Pewarisan

Di Sabu, Rote dan Timor, dibedakan dua macam warisan, warisan dari orang tua kandung atau orang tua angkat yang telah mengangkat seorang anak atau lebih, sejak kecil secara resmi untuk menerima warisan dan warisan dari nenek dan atau generasi yang lebih tua lagi. Kelompok yang menganut prinsip matrilineal, tidak melakukan pembagian kedua macam warisan tersebut di atas, melainkan di rumah keluarga ibu yang diperuntukkan bagi maksud itu. Kelompok yang menganut prinsip patrilineal pada umumnya juga tidak membagi warisan namun jika dianggap perlu atau jika timbul sesuatu peristiwa tertentu yang menyebabkan warisan orang tua harus dibagi oleh anak-anak, terutama anak-anak pria dengan sepengetahuan keluarga yang dituakan.

Siklus Hidup Perseorangan

Siklus hidup perseorangan menurut adat praktis sudah terdesak setelah penduduk menganut agama monotheis, terutama akibat intensifikasi penyeberan agama Kristen sejak tahun 1930. Hal ini terjadi karena siklus hidup perseorangan menurut adat itu terjalin erat dengan upacara animis dan dinamis. Siklus hidup perseorangan itu berbeda-beda pada suku bangsa di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pulau Timor terutama pada suku Metto, siklus hidup perseorangan itu dapat diintensifiser dengan mengetahui lamanya upacara-upacara itu dilakukan.

Pola Hidup Sehari-hari

Penduduk pedesaan, pada masa penyadapan lontar, bangun sebelum fajar menyingsing agar pria menyadap lontar hingga kira-kira jam 09.00 pagi. Seluruh anggota keluarga termasuk wanita dan anak-anak bertugas memasak nira sampai menjadi gula. Setelah selesai menyadap, dapat beristirahat atau membantu memasak gula atau menyiapkan alat-alat penyadapan untuk petang hari yang dimulai jam 15.00 dan berakhir sekitar jam 19.00. Kegiatan ini berlangsung antara bulan Juni sampai bulan November. Sesudah musim penyadapan lontar dan pemasakan gula, tibalah musim peladangan/persawahan. Oleh karena itu, penduduk penyadap lontar yang sekaligus berladang/bersawah, selalu sibuk sepanjang hari sehingga praktis tidak ada pengangguran bermusim.

The wedding party and family sacrifice depend upon the principle of relation followed. So are the conditions of marriage proposal and negotiation. The level of relation owned by the would-be couple has a continuous influence on the course of marriage negotiation and on the things necessary to be done by the man's side.

Dower

The wedding presents and suitor's service are not similar to those in general. The man's side are supposed to give sirih and pinang in order that the marriage is valid and acknowledged by both families and the public. The followers of patrilineal principle will determine a fixed amount of money (very little), goods (minimum) and simple wording for the validity of a marriage and its consequences.

System of Inheritance

In Sabu, Rote and Timor, there are two kinds of inheritance: 1) which is received from the own parents or the step parents adopting a child/children legally from childhood, and 2) which is received from the grandparents or the older generation.

The groups following the matrilineal principle will not execute the two procedures of inheritance as mentioned above. Neither will the patrilineal groups, unless it is necessary or there is a certain occurrence compelling them to do so.

Individual's Living Cycle

The individual's living cycle by culture has practically been pressed aside. This is due to the fact that people at the moment adhere to monotheism, especially Christian faith the intensification of which was spread since 1930.

The living cycle varies individually in the tribes of East Nusa Tenggara. It links closely with animism and dynamism ceremonies. In Timor Island, especially Metto Tribe, the individual's living cycle can be judged by finding the duration of the ceremonies concerned.

Type of Daily Life

In the days of fan-palm tapping, the rural men get up very early to do the tapping until approximately 09:00 a.m. All members of the family, including women and children, cook the unfermented palm juice until it becomes sugar. Then the men can have a rest or give a help in sugar cooking or preparing the equipment for afternoon tapping (from 03:00 to 07:00 p.m.). This activity takes place from June to November. After that, the time for rice-growing comes.

Based on such a description given above, it is clear that the people (functioning as fan-palm tapper/rice-grower) are engaged in busy days and so have no unoccupied season time.

Type of Seasonal Life

During the summer time, the rural life seems brighter. it is embellished with various joys on the success of harvest time. The climatic condition, which is not so adverse, enables the people to carry out tratidional and wedding parties. This kind of occasion will usually direct to the extravagance of earnings acquired from the previous harvest time. The opportunity for mutual visits, which can be done without any natural hindrance, brings about the waste of time and energy, if it is viewed from the economic aspect.

At any rate, the summer time is the most sociological religious seasonal life in rural areas and it presents various cultural activities to the people concerned.

Ethnic Groups

Ethnically, Sabu, Rote and timor are inhabited by some different tribes. Timor Island is at present dominated by the people with the Dawan language. They ar called as Timor tribe. In traditional term, they are mentioned as "Atoni pah Meto", which means "people who can live in dry land".

In majority the Dawan tribe inhabit the District of Southern Central timor and the District of Northern Central Timor. Some live in southern Belu (Manlea). The Belu tribe inhabit the District of Belu, and some in Northern Central Timor. Besides, the Belu people (Tetum) spread in East timor. The Helong tribe live in Semau Island - a small island close to West Kupang, Timor.

Viewed from mythological source, the people of Timor, Rote and Sabu in particular, and the people of East Nusa Tenggara in general are orientated from three origins. 1) The groups believing that they were originated from the west include the tribes of Sumba, Sabu, Manggarai, Southern Belu, some parts of East Flores, Solor, Alor and Buna. 2) Those believing that their ancestors were from the east include the people of Rote, Helong, Dawan,

Pola Hidup Musiman

Tadi telah disinggung bahwa pola hidup sehari-hari berbeda antara peladang/penyadap lontar dengan peladang/pesawah. Pola ini berubah intensitasnya sesuai dengan perubahan musim. Dengan adanya perbedaan pola hidup sehari-hari antara kelompok penduduk yang berbeda mata pencahariannya, dapat dikatakan pada musim kemarau kehidupan pedesaan lebih semarak. Berbagai kegembiraan yang erat hubungannya, misalnya dengan panen yang berhasil. Keadaan iklim yang tidak/kurang menghalangi gerak-gerik penduduk, menyebabkan penduduk berkesempatan melakukan berbagai pesta adat, pesta perkawinan yang menjuru pada berbagai pemborosan hasil jerih payah masa-masa sebelumnya, menyebabkan pemborosan waktu dan tenaga ditinjau dari sudut ekonomi namun ditinjau dari sudut sosial, musim kemarau adalah musim kehidupan pedesaan yang paling bernilai sosiologis religius.

Pada musim kemarau, terjadi suatu pengangguran musiman secara ekonomis, tetapi di pihak lain timbul kegiatan kultur dan lain-lain.

Kelompok Ethnis

Secara Ethnis Sabu, Rote dan Timor didiami oleh beberapa suku bangsa yang berbeda. Di Pulau Timor wilayah Indonesia, dewasa ini didiami oleh suku yang berbahasa Dawan, sering pula disebut suku Timor. Dalam istilah daerahnya disebut "Atoni pah Meto" yang berarti "orang dapat atau orang yang mendiami tanah kering".

Suku Dawan mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Orang Dawan ada sebagian yang tinggal di wilayah Belu Selatan (Manlea), Suku Belu (Tetum) mendiami wilayah Kabupaten Belu dan sebagian di wilayah Timor Tengah Utara. Disamping wilayah tersebut orang Belu (Tetum) tersebar pula di wilayah Timor Timur. Suku Helong mendiami Pulau Semau sebuah pulau kecil dekat kota Kupang dari Kecamatan Kupang Barat bagian daratan Timor.

Apabila ditinjau dari sumber mythos, penduduk di wilayah Timor, Rote dan Sabu khususnya serta Nusa Tenggara Timur pada umumnya, berorientasi pada 3 jenis asal usul. **Pertama,** yang menganggap asal usul nenek moyangnya dari Barat. Dalam kelompok ini termasuk suku Sumba, Sabu, Manggarai, Belu Selatan, sebagian Flores Timur, Solor, Alor dan Buna. **Kedua,** menganggap asal usul nenek moyang dari Timur, termasuk dalam kelompok ini ialah orang Rote, Helong, Dawan, sebagian Flores Timur, Solor dan Alor. **Ketiga,** dari atas langit, dari gunung dan sebagainya. Termasuk dalam kelompok ini adalah Kemak, Akui, Larantuka dan Belu Selatan.

Apakah orientasi asal usul berdasarkan mythos ini dapat membuktikan asal usul yang sebenarnya, hal ini masih perlu penelitian yang lebih mendalam.

Pendatang/Asing

Pendatang-pendatang kelompok tertua yang datang ke wilayah ini dengan berbagai latar belakang. Ada yang karena ekonomi dan perdagangan, politik dan sebagainya.

Pendatang yang tertua adalah orang-orang Cina, yang datang ke wilayah ini dalam waktu yang cukup lama, karena adanya perdagangan Cendana. Dengan motif yang sama kemudian datang juga orang-orang Bugis, Makassar yang jumlahnya relatif kecil, mereka tinggal di daerah-daerah pantai. Orang-orang suku Sabu dan Rote banyak yang pindah ke pulau Timor sejak masa penjajahan. Bahkan sepanjang pantai Utara Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan didiami orang-orang Rote. Walaupun sangat sedikit, di wilayah ini dijumpai pula orang-orang Arab. Untuk wilayah kota Kupang dan daerah Helong sekarang lebih bersifat kosmopolitis.

Logat

Di wilayah Pulau Timor, Sabu dan Rote dikenal adanya bermacam-macam bahasa. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Yakni kelompok bahasa Bima, Sumba dan kelompok Ambon Timor. Yang termasuk dalam kelompok Bima Sumba adalah Bahasa Sabu. Dalam bahasa ini termasuk bahasa Raijuna (sebuah pulau kecil dekat Pulau Sabu) dan Ndao (sebuah pulau kecil dekat Pulau Rote).

Sabu dalam struktur pemerintahan termasuk Kabupaten Kupang, namun secara bahasa masuk kelompok Sumba Bima. Sedang yang termasuk kelompok bahasa Ambon Timor di wilayah ini adalah bahasa-bahasa di Pulau Rote dan Timor yang meliputi bahasa Dawan atau Metho atau Lasi Metha. Bahasa ini dipergunakan sebagian besar di wilayah Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, sebagian kecil Belu Selatan dan Oekusi (Timor Portugis).

Bahasa Tetum dipergunakan di wilayah Kabupaten Belu, sebagian Timor Tengah Utara dan Wilayah Timor Portugis.

some parts of East Flores, Solor and alor. 3) The groups believing that they were from the sky, mountains, etc include the people of Kemak, Akui, Larantuka and Souther Belu.

a farther investigation is still required so as to find out whether such a mythological orientation can prove the real origins.

Comers / Strangers

The oldest group came to this territory for various reasons - economy, trade, politics, etc.

The first comers were the Chiness people, who came and stayed for a long time for sandalwood trading. For the same purpose, Makassar people then came. They lived in coastal areas.

Most of the Sabu and Rote tribesmen moved to Timor Island since colonial period. The latter live along the north coast of the District of Kupang and Southern Central Timor. Here, there are only a small number of Arabic people. At the moment Kupang and Helong areas are cosmopolitan.

Dialects

Even though in Timor, Sabu and Rote there are several known dialects, in general they are classified in two groups, ie Bima - Sumba and Ambon - Timor. The former group includes Sabu dialect - Raijuna dialect (a small island near Sabu) and Ndao dialect (a small island near Rote).

In the governmental structure Sabu belongs to the District of Kupang. Yet, dialectically it is a part of Bima Sumba group.

The Ambon - Timor group includes the dialects in rote and timor - the dialects of Dawan or Metto or Lasi Metta. These dialects are spoken mostly in the District of Kupang, Southern Central Timor, Nothern Central Timor, Southern Belu (only a little) and Oekusi (Portuguese Timor).

The Tetum dialect is used in the District of Belu, some parts of Northern Central Timor and Portuguese Timor.

The Kemak dialect is spoken in Northern Belu (near the Portuguese Timor border); Buna dialect in the Self - Government of Lakmanen - Belu and Portuguese Timor; Helong dialect in Rote Island and along the north coast of the District of Kupang; Melayu - Kupang dialect in Kupang town - this dialect is the amalgamation of Melayu dialect, local dialect and Melayu - Ambon dialect.

10. Land Titles

A famous Rote proverb says "Helong ma Sonbai Dae", which means "Helong and Sonbai have free land and aboriginals have water". In other words, land and water are for all people. In fact, Rote does not know the name of Timor, but "Sonbai". For example, the sentence "Let's go to the inland areas of Timor" is said "Let's go to the inland areas of Sonbai". Timor people are called Sonbai people. thus,'Helong and Sonbai have land' means 'Helong and Timor have land'.

In every part of Indonesia, there are various areas of united people. They regulate and arrange their own housekeeping. It is conducted on the basis of people's original lives which show the characteristics of mutual aid, concord, solidarity, interrelation and the same need. These were inherited by their ancestors far before outer influence came in.

Like other parts in Indonesia, Timor, Rote, Sabu, Flores and Sumba are the areas of united people marked with bloodrelation and similar race. People unity in Timor is called "Kanaf", in Belu "Fukun", in Rote "Leo" and in Sabu "Udu". There then are villages/areas with people of the same race and joint dwelling-place, like in Kupang Town. Kanaf, fukun, Leo and Udu are further called "tribe". the existing dialects are Belu, Timor, Rote and Sabu. Viewed from historical aspect, there are three groups:

1. *Those who are considered the oldest people and not known from where they derived actually. They are also considered the original inhabitants of the area concerned, eg "Kuneuf" people in Northern Central Timor.*
2. *Those coming from the east (Maluku).*
3. *Those coming from the west (Java, Malacca, Sailan, etc).*

Rights and Ownership in Timor Land

The opening and cultivation of land in Timor are usually conducted by transference. In general a piece of land is cultivated for three years, then another new one is opened and cultivated for three years, too. Every year a farmer works on two arable lands - the old and the new.the first arable land is left for a few years and planted with shrubs. It is termed "mnuke". By traditional law, the first person working on it is regarded as the owner and so has the right to give it to his heir. Any plants existing on the land, planted or not planted, will belong to the ownership of the person.

Bahasa Kemak dipergunakan di Belu bagian Utara dekat perbatasan Timor Portugis. Bahasa Buna dipergunakan di wilayah Swapraja Lakmanen di Belu, serta Timor Portugis. Bahasa Helong dipergunakan di wilayah pulau Rote dan wilayah sepanjang pantai Utara Kabupaten Kupang. Bahasa Melayu Kupang dipergunakan di wilayah Kota Kupang. Bahasa ini merupakan percampuran bahasa Melayu dan bahasa daerah serta bahasa Melayu Ambon.

10. Hukum Tanah

Peribahasa Rote "Helong ma Sonbai Dae", artinya "Helong dan Sonbai punya tanah Merdeka dan Pribumi punya air". Dengan kata lain bumi dan air milik bersama. Rote tidak mengenal nama Timor, hanya disebut "Sonbai". Umpamanya mengatakan "mari ke pedalaman Timor," dikatakan "mari ke pedalaman Sonbai". Orang Timor disebut orang Sonbai. Jadi yang dimaksudkan dengan Helong dan Sonbai mempunyai tanah adalah Helong dan Timor mempunyai tanah. Di seluruh Indonesia terdapat bermacam-macam daerah persekutuan penduduk, yang merupakan daerah persekutuan yang terendah, yang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Rumah Tangganya diatur atas dasar dan sendi-sendi penghidupan asli dari penduduk, sebagai sifat-sifat gotong-royong, kerukunan, kekeluargaan, kata sepakat dan umumnya bersendikan rasa hidup sepenanggungan. Sendi-sendi penghidupan yang asli itu merupakan warisan, jauh sebelum masuk pengaruh dari luar.

Sebagaimana halnya dilain-lain daerah di Indonesia, daerah persekutuan penduduk yang bersendikan hubungan darah dan masyarakat seketurunan terdapat di Timor, Rote dan Sabu, juga di Flores dan Sumba. Kesatuan masyarakat ini di Timor disebut "Kanaf", di Belu "Fukun", di Rote "Leo" dan "Udu" di Sabu. Dengan demikian, terdapat desa-desa/daerah hukum yang bersendikan masyarakat seketurunan (Genealogische rechtsgemeeshappen). Bentuk yang kedua adalah daerah-daerah/desa-desa yang bersendikan atas tempat tinggal bersama (Territoriale rechtsgemeenschappen), seperti halnya di Kota Kupang. Dalam uraian selanjutnya kata "suku" untuk Kanaf, fukun, leo dan udu. Ditinjau dari segi bahasa, terdapat bahasa Belu, Timor, Rote dan Sabu dan dari segi sejarah dapat dibagi atas tiga kelompok yakni:

1. Mereka yang merupakan tertua, yang tidak diketahui dengan pasti asal usulnya, dianggap sebagai penghuni asli wilayah yang bersangkutan, umpamanya seperti "Kune uf" di Timor Tengah Utara.
2. Mereka yang datang dari sebelah Timur (Maluku).
3. Mereka yang datang dari sebelah Barat (Jawa, Malaka, Sailan dan sebagainya).

Hak dan Kekuasaan di Daratan Timor

Pembukaan dan penggarapan tanah di daratan Timor umumnya dikerjakan secara berpindah-pindah (roofbouw). Setelah sebidang tanah dikerjakan biasanya selama 3 tahun, kemudian membuka ladang baru lagi untuk dikerjakan lagi selama 3 tahun. Pada lazimnya seorang petani mengerjakan tiap tahun dua ladang (satu ladang lama dan satu ladang baru). Ladang pertama ditinggalkan beberapa tahun lamanya ditumbuhi belukar. Ladang yang ditinggalkan ini disebut "mnuke". Orang yang pertama menggarapnya menurut hukum adat dianggap sebagai yang punya hak atasnya dan berhak pula meninggalkan tanah ladang itu kepada ahli warisnya. Bukan saja tanah ladang, tetapi segala tumbuh-tumbuhan yang terdapat di atasnya, ditanam atau tidak, seperti pohon cendana, dianggap oleh setiap orang sebagai hak orang yang mula pertama menggarap tanah itu.

Hak dan Kekuasaan di Rote

Hubungan masyarakat seketurunan dengan tanah ulayatnya seperti yang diuraikan tadi. Asal mulanya orang mendapatkan hak seperti yang disebut "voorkeursrecht". Penggarapan tanah tidak diadakan secara berpindah-pindah (roofbouw). Berhubung dengan kondisi tanah dan air, maka tanah dikerjakan terus menerus disertai dengan penanaman pohon-pohon yang berguna. Dimana dapat diadakan pengairan maka tanah berubah menjadi sawah dan "mamar" yang berarti kebun yang ditanami dengan pohon-pohon kelapa, pinang, sirih dan lain-lain. Di tempat-tempat dimana air hujan tergenang, diusahakan sawah tadahan dan ditanami padi. Dengan demikian haknya atas tanah itu tetap kuat serta menjadi hak milik. Hak milik ini sudah sedemikian kuatnya, sehingga telah menjadi milik pusaka (warisan).

Selain dari pada yang diuraikan tadi ada juga tanah yang menjadi hak milik pusaka yakni apa yang disebut "Tina" dan "Osi". **Tina** ialah ladang yang hanya bermanfaat pada musim hujan dan ditanami jagung, kacang-kacangan dan sebagainya. **"Osi"** ialah tanah pekarangan. Setiap orang senantiasa berusaha agar tanah menjadi miliknya sendiri,

Right and Ownership in Rote

Here the cultivation of land is not done by transference. Owing to the conditionof soil and water, land is done continuously and also planted with useful trees. Should a piece of land be irrigated, it will then become a rice-field and "mamar" - a horticultural field having such trees as coconut, pinang, sirih, etc. In places where the inundation of rain occurs, rice-fields depending onrain are made and planted with rice plants. There fore, the ownership of a land is so firm that it later becomes a legacy.

Besides, there are also lands regarded as the heirloom ownership and termed "Tina" and "Osi". The former is an arable land which is only usable during the rainy season and planted with corn, beans, etc. while the latter is a yard. Everybody makes great efforts in order that a land can be his own. This kind of land is known as "the heirloom ownership" and "milik ue' nak" (self-effort).

Rights and Ownership in Sabu and Raijuna

By traditional law, the lands in East Nusa Tenggara include:

- *Udu Land - The person is charge of this is called "Bengu Udu". It is the possession of all Udu people and each member has the right to work on it. If a disagreement takes place, the Bengu Udu will handle and make a decision for it.*
- *"Rai Kerogo" Land - It is the Rai Udu land which has been given as Kerogo land, and the personin charge is the head of Kerogo called "Kettu Kerogo". The people of Kerogo have the same rights on it as Rai Udu land.*
- *"Rai Eikebohu Miha" Land - It is the land of self-ownership. When the "Bengu Udu" or "Kettu Kerogo" has sold or given some of Udu or Kerogo land, it then becomes "Rai Eikebohu Miha" land. In other words, it is a land which has been purchased by someone from inside the Udu/Kerogo or other Udu. Since it can be inherited, its status will later become "Hegai Keboro" land.*
- *"Rai Hegai Keboro" Land - It is the land of heirloom. All legal descendants have the right to cultivate it, and each member can claim it to be the permanent joint ownership.*
- *"Rai Awi" Land - It is the land of present. When someone - whether from inside or outside the Udu - has done his best for "Bengu Udu" then can, through the agreement with all the heads of "Kerogo", give a piece of land to him as a present. This usually happens in wartime and other occasions.*
- *"Rai Ngatikolo" Land - It is the land on which one only has the right to cultivate and is paid for it.*
- *"Rai Belo Hape" Land - It is the extra land which is not cultivated, eg meadow for breeding-animals.*

Besides the above description, women have the rights for the following lands:

- *"Rai Herru Kabala" Land - It is the land given by a father to her daughter who is married to a man, either from inside or outside the "udu". It can be in the form of arable land, rice-field, horticultural field, etc. This kind of land can only be received by a daughter or her female descendant. But, is she has no daughter, the "Rai Herru Kabala" land will then be "Kamma" - returned to the male descendant of the father.*
- *"Rai Eioke Wokelli Pili" Land - It is the land which has been bought by a married woman. They money can derive from the blankets she herself weaves or from the breeding-animals she owns. If she has no daughter, her male descendant may later receive the land.*
- *"Rai Lora" Land - It is the land given by a father to her daughter who is married but refuses to stay in her husband's house.*

Apart from those, there are also lands acquired by victory in wartime. Here the defeated should give up their lands to the winners.

Marital Tradition

In Rote Island, marriage is known by the folowing traditions:

1. *By proposal:*
   a. *"Ndo-ndo"*
   b. *"Natane" - proposing*
   c. *"Nakutu Belis" - discussing to determine the "belis"*
   d. *Marital ceremony*
   e. *"Dode" - the escorting of the bride to her would-be husband"s house.*
2. *By "Luu" - keeping*

Marriage by Proposal

"Ndo-ndo" means "asking the heart". The parents of the boy have two women (in general, one is the sister of father, while the other one is the sister

sehingga dikenal dengan "milik pusaka" dan "milik ue' nak" (usaha sendiri). Biarpun hak atas tanah sawah sudah menjadi hak milik ataupun milik pusaka, tetapi tetap mempunyai fungsi sosial, mulai dari mengerjakannya, memungut sampai selesai.

Hak dan Kekuasaan di Pulau Sabu dan Raijuna

Tanah-tanah hukum adat di Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

- **Tanah Udu** yang dikepalai oleh kepala persekutuan "Bengu udu". Tanah ini milik bersama masyarakat Udu dan setiap anggotanya berhak untuk menggarap. Jika ada perselisihan, "Bengu Udu" yang memutuskannya.
- **Tanah "Rai Kerogo",** yakni tanah Rai Udu yang telah diberikan untuk tanah ulayat Kerogo, yang dikepalai oleh kepala Kerogo "Kettu Kerogo". Hak masyarakat Kerogo atas tanah Kerogo sama dengan tanah Rai Udu.
- **Tanah "Rai Eikebohu Miha"** (tanah milik sendiri) perseorangan. Sebahagian dari tanah Udu (Kerogo) bila telah dijual atau dihadiahkan oleh "Bungu Udu" atau "Kettu Kerogo" kepada seseorang, berubahlah sifat tanah menjadi tanah "rai eikebohu miha". Jadi tanah "rai eikebohu miha", asalnya dari tanah yang sudah dibeli oleh seseorang maupun dari udu lain ataupun dalam "udu/kerogo" sendiri. Tanah ini dapat diwariskan kepada anak cucunya. Maka berubahlah sifat tanah tersebut menjadi tanah "Hegai Keboro" (tanah pusaka).
- **Tanah "Rai Hegai Keboro"** (tanah pusaka). Semua turunan yang sah dapat menggarapnya dan setiap turunan dapat menuntut supaya tanah itu tetap menjadi tanah milik (individueel bezit) bersama.
- **Tanah "Rai Awi"** (tanah hadiah). Seseorang dari lain udu ataupun dalam udu sendiri yang berbuat jasa kepada seseorang, "Bengu Udu" atau seseorang "Pulodo" yang berarti Ketua Dewan Mone Ama (umumnya dalam peperangan dan lain-lain) maka "Bengu udu" tersebut melalui musyawarah dengan semua kepala "kerogo" dalam udu itu dapat menghadiahkan (awi) sebidang tanah kepada orang berjasa itu.
- **Tanah "Rai Ngatikolo",** yakni seseorang hanya mendapatkan hak untuk menggarap dan hasilnya dari tanaman atas tanah tersebut dengan kewajiban membayar hasil.
- **Tanah "Rai Belo Hape"** (tanah lebih yang dapat dikerjakan) seperti tanah padang rumput tempat melepaskan ternak.

  Disamping tanah-tanah yang sudah disebutkan, ada pula hak-hak wanita atas tanah yang diakui, yakni:

  Hak atas tanah "Rai Herru Kabala". Seorang anak perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki, baik se "udu" ataupun dari lain "udu" mendapatnya selaku hadiah dari bapaknya (tanah berupa ladang, sawah ataupun kebun dan sebagainya). Tanah "Rai Harru Kabala" hanya boleh diterima oleh anak perempuan atau turunan perempuan dari yang menerima hadiah itu. Bilamana turunan perempuannya putus maka tanah-tanah "rai Harru Kabala" tersebut akan "Kamma" artinya dikembalikan kepada turunan laki-laki yang menghadiahkan tanah itu.
- **Tanah "Rai Eioke Wokelli Pili".** Seseorang wanita yang telah kawin lalu dengan usahanya sendiri membeli sebidang tanah dengan kain selimut yang ditenunnya sendiri atau dengan hewan yang didapatinya sendiri, maka tanah yang demikian disebut tanah "rai eioke wokelli pili". Bilamana tidak ada turunan perempuan maka turunan laki-laki boleh memiliki tanah itu.
- **Tanah "Rai Lora".** Bilamana seorang anak perempuan dikawinkan lalu anak ini membuat keonaran tidak mau menurut kehendak orang tuanya, yaitu tidak mau turut ke rumah suaminya, maka orang tuanya memberikan tanah kepadanya untuk diusahakan. Tanah itu disebut "Tanah Lore". Selain daripada golongan-golongan tanah tersebut, adapula terdapat tanah-tanah yang diperoleh karena kemenangan yang didapat dalam suatu peperangan pada masa dahulu. Sehingga pihak yang kalah menyerahkannya kepada pihak yang menang.

Hukum Perkawinan

Di pulau Rote dikenal adat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan dengan cara meminang:
   a. Ndo-ndo.
   b. Meminang atau "Natane".
   c. "Nakutu belis" atau musyawarah menetapkan belis.
   d. Upacara perkawinan.
   e. "Dode" yakni pengantin perempuan diantar ke rumah calon suami.
2. "Luu" atau mengeram

of the boy concerned) go to the girl's house. After arriving there, they then inform that they are the representatives of the boy and his parents,who come to state that the boys is very interested in the girl and so ask if she has been engaged or not.

"Natane" - proposing

The boy's parents and family come to the girl's house, bringing a sirih-box replete with sirih and pinang. This sirih box is called "Nduna Tepak" and made of palm-leaf. It is held by one of the women coming at the time of "Ndo-ndo". To welcome them, the parents and family of the girl gather. The two sides soon request each other to enjoy the sirih. After that, the boy's side informstheir purpose of coming. The parents of the girl then ask their daughter about the marriage proposal. As soon as the boy's side receives an answer of approval, the "Nduna Tepak" is opened up and the two sides enjoy the sirih and pinang again. The remains are distributed to the girl's relative to the girl's side. The intention of this is that when the time for marriage is coming, each of these girls should bring a pillow as a wedding present for the girl.

Since then the girl and the boy are considered an engaged couple.

Dode

One day after the marital ceremony, the married couple is escorted to the bridegroom's house. This tradition is termed "Dode" and includes the carrying of wedding presents from the bride's family. This carrying is done as a compensation for the received "belis", and its condition depends upon the things prepared by the bride's family. In general it is in the forms of breeding-animals, rice, sleeping-mats, pillows and blankets.

"Luu" Marriage

The boy stays in the girl's house and does housework for a season of rice-field cultivating and two seasons of palm-leaf tapping, but sometimes longer. During this period, the parents of the girl notice his work spirits, discipline, character and mentality. The girl and the boy are allowed to go along with one another so as to make closer relationship. the next process is "Nakutu Belis", marital ceremony in Rote.

11. Inheritance

In Rote, inheritance means the distribution of a dead man's property to his descendants. It is classified in two groups; heirloom property and the property acquired from parent's work and efforts. The procedure is by calling the descendants of the dead person (done by "Lasy Leo" and village elders) to discuss and determine the distribution. Daughters usually receive jewelry, but can also receive a rice-field called "kakau luak" - which means "a plate of rice".

Perkawinan dengan cara meminang

Yang dimaksud Ndo-ndo yaitu tanya hati. Orang tua si pemuda mengutus dua orang wanita, yang biasanya terdiri dari saudara perempuan ayah si pemuda dan gadis dari saudara perempuannya pemuda. Sampai di rumah orang tua si gadis, mereka menyatakan maksud kedatangannya. Mereka sebagai penyambung lidah dari si pemuda bersama-sama orang tua dan keluarganya menyampaikan berita, bahwa anak atau adik mereka menaruh hati pada anak gadis tuan rumah dan menanyakan apakah si gadis yang dimaksud sudah ada yang meminangnya atau belum.

"Natane" atau meminang

Yaitu tibanya waktu yang ditentukan. Orang tua si pemuda dan keluarga datang ke rumah orang tua si gadis, dengan membawa tempat sirih berisi sirih dan pinang. Tempat sirih bernama "Nduna Tepak" diperbuat dari daun lontar. Tempat sirih dipegang gadis yang datang pada waktu "ndo-ndo". Untuk penyambutan ini orang tua si gadis berkumpul dengan keluarganya. Kedua belah pihak saling mempersilahkan makan sirih. Seusai makan sirih, pihak si pemuda mulai menyatakan maksud kedatangannya. Setelah orang tua si gadis mendapatkan jawaban setuju dari anak gadisnya, lalu pihak si pemuda menerima jawaban setuju. Barulah tempat sirih "Nduna Tepak" yang berisikan sirih dan pinang dibuka. Kedua pihak makan sirih dan pinang yang masih sisa dibagikan kepada para gadis yang berhubungan dengan keluarga si gadis yang dipinang. Maksudnya apabila sampai waktunya pernikahan, tiap gadis yang menerima sirih dan pinang membawa setikar/satu bantal sebagai hadiah kepada pengantin perempuan. Mulai saat itu si gadis dan si pemuda sudah dikatakan bertunangan.

D o d e

Sehari setelah pesta perkawinan, kedua pengantin diantar dari rumah pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Upacara ini disebut "Dode". Pengantaran ini dengan membawa hadiah-hadiah dari keluarga pengantin perempuan. Pembawaan ini sebagai imbalan terhadap belis yang sudah diterima dan inipun tergantung daripada persediaan keluarga pengantin perempuan. Biasanya yang dibawa adalah ternak, beras, tikar dan selimut.

Perkawinan "Luu"

Si pemuda tinggal di rumah orang tua si gadis dan melakukan pekerjaan rumah tangga selama satu musim kerja sawah-ladang dan dua musim penyadap lontar. Tetapi, adakalanya lebih lama. Selama itu orang tua si gadis memperhatikan gairah kerja dan disiplin, budi pekerti dan mental si pemuda. Kedua muda-mudi diperbolehkan bergaul, berkenan untuk membentuk rumah tangga dengan si pemuda, maka prosedur selanjutnya adalah seperti yang tersebut dalam hal nakutu belis; upacara perkawinan dan dode. Demikian adat perkawinan di Rote.

Apabila permufakatan permohonan dikabulkan, ditetapkan tanggal dan hari pertemuan berikutnya untuk memusyawarahkan hal-hal yang berhubungan dengan perongkosan "Suu'Oe" air susu ibu dan pesta perkawinan. Pertemuan berakhir dengan makan bersama.

11. Hukum Pewarisan

Di Rote adat warisan ialah pembahagiaan harta kekayaan orang yang meninggal kepada anak-anaknya. Harta peninggalan dibedakan dalam dua macam, yaitu: Harta peninggalan asal pusaka dan harta peninggalan yang telah diperoleh atas usaha kerja dan pencaharian dari suami istri. Prosedurnya anak-anak dipanggil "Lasi Leo" dan tua-tua adat, lalu pembagiannya dimusyawarahkan dan ditetapkan. Barang-barang perhiasan dibagi juga kepada anak-anak perempuan. Dan bisa juga anak perempuan mendapat bagian sebidang sawah, yang disebut "kakau luak" yang berarti "nasi satu piring".

B A B / *CHAPTER II*

PEMBANGUNAN DAERAH

REGIONAL DEVELOPMENT

KEBIJAKSANAAN Regional yang bersifat Nasional dalam pembangunan daerah mulai diletakkan dalam era Pemerintahan Orde Baru, sebagaimana digariskan dalam GBHN yang penjabaran selanjutnya dicerminkan dalam Repelita demi Repelita dengan tujuan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu negara kesatuan melalui pencapaian sasaran, antara lain keseimbangan pertumbuhan antar daerah. Untuk itu berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah harus dikembangkan secara optimal.

Dalam Pelita III diidentifisir 13 kawasan potensial dan 6 kawasan telah dibuatkan studinya oleh "Direktorat Tata Kota dan Daerah melalui proyek penyiapan Program Investasi di daerah NTB/NTT" (Pemerintah Indonesia, UNDP/IBRD).

Ke 6 buah kawasan tersebut adalah: 1) Kawasan Lembor: Satuan Wilayah Pengembangan (SWP Flores/Sub/SWP Kabupaten Manggarai), 2) Kawasan Mbay/Aisesa (SWP Flores/Sub SWP Kabupaten Ngada), 3) Kawasan Bena (SWP Timor/Sub SWP Kabupaten Timor Tengah Selatan), 4) Kawasan Oeroki (SWP Timor/Sub SWP Timor Tengah Utara dan Belu), 5) Kawasan Besikama (SWP Timor/Sub SWP Kabupaten Belu) dan 6) Kawasan Kodi-Laratama (SWP/Sub SWP Kabupaten Sumba Barat).

Strategi pembangunan bagi pengembangan kawasan ini bertujuan mengembangkan sektor Pertanian agar dalam kurun waktu tertentu dapat diciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan sebagian besar dari keluarga petani keluar dari kemiskinan dan dapat menikmati tingkat hidup yang lebih baik.

Pembangunan Sosial Politik

Sasaran pembinaan politik di Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur, identik dan searah dengan sasaran pembinaan politik Nasional. Dengan titik berat pada peningkatan stabilitas politik sebagai syarat mutlak bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan. Penggarisan sasaran pembinaan politik tersebut dimaksudkan bagi terciptanya tujuan pembinaan politik di daerah. Yaitu untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur.

Strategi pembinaan politik di Nusa Tenggara Timur secara jelas dituangkan dalam "Repelita III Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur". Antara lain menyebutkan bahwa pembangunan politik di NTT diarahkan untuk memantapkan perwujudkan Demokrasi Pancasila.

Salah satu kegiatan pembangunan politik selama Pelita III adalah penyelenggaraan Pemilu 1982, yang secara umum dapat dikatakan di NTT berjalan lancar dan aman.

Khusus untuk membina kesatuan bangsa telah diusahakan untuk mengaktifkan BAKOM PKB di tingkat Propinsi maupun Kabupaten se Nusa Tenggara Timur, sesuai keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1967 tentang kebijaksanaan pokok menyangkut warga negara Indonesia keturunan asing.

Pembangunan bidang ekonomi

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Propinsi Nusa Tenggara Timur selama Pelita III adalah sebesar 10,5%, sedangkan target yang ditetapkan dalam Pelita III sebesar 8,5 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada Pelita II yang 7.5%, laju pertumbuhan 10,5% dalam Pelita III merupakan peningkatan sebesar 3%. Laju pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh semakin meningkatnya pendapatan regional. Di akhir Pelita II jumlah pendapatan regional Nusa Tenggara Timur sebanyak Rp142.834 juta. Sedang di akhir Pelita III pendapatan regional Propinsi ini meningkat menjadi Rp173.799 juta.

Pendapatan per kapita di akhir Pelita II sebanyak Rp41.697,- (menurut harga konstan 1975). Sedangkan pendapatan per kapita di akhir Pelita III sebanyak Rp61.010,-. Kalau dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional, dimana dalam tahun 1978 mencapai Rp138.340,- dan di tahun 1982 sekitar Rp500.000,- (harga berlaku), pendapatan per kapita NTT masih berada jauh di bawah rata-rata pendapatan Nasional.

THE NATIONALLY regional policy for development is based on the era of New Order Government as regulated in the Guidelines on State Policy. Its description is further reflected in every Five-Year Development Plan. The aim is to consolidate the whole nation of Indonesia by means of reaching the equilibrium of inter-region growth. For this purpose, various resources contained in each area are developed optimally.

In the Five-Year Development III, 13 potential areas were identified and a study was made for the 6 areas. This work was done by the Directorate of Rural and Urban Planning through the preparation project of Investment Program in West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (Indonesian Government, UNDP/IBRD).

The 6 areas include: 1) Lembor: Development Area Unit of Flores/Sub/Manggarai District, 2) Mbay/Aisesa: Development Area Unit of Flores/Sub/Ngada District, 3) Bena: Development Area Unit of Timor/Sub/Southern Central Timor District, 4) Oeroki: Development Area Unit of Timor/Sub/Northern Central Timor and Belu districts, 5) Besikama: Development Area Unit of Timor/Sub/Belu District, 6) Kodi-Laratama: Development Area Unit of Sumba/Sub/West Sumba District.

The development strategy for the above-mentioned areas is focused on agricultural sector in order that in a certain duration, farmers and their families can get rid of poverty and so gain a better living atmosphere.

Social Political Development

The target of political promotion in the Province of East Nusa Tenggara is identical and in the same direction as that of the national one. It is stressed on the enhancement of political stability, for this is an absolute requirement for the well-run-ning and success of governmental and development programs.

The strategy of political promotion in East Nusa Tenggara is clearly stated in "the Five-Year Development Plan III for the Province of East Nusa Tenggara". It says that the political development in this area is intended for the realization of Pancasila Democracy.

One of the political development activities in East Nusa Tenggara is the performance of the 1982 General Election, which ran well and safely.

Se as to stabilize the nation unity, BAKOM PKB has been activated in accordance with President's Decree No 40 of 1967 concerning the basic policy for Indonesian citizens having foreign nationality.

Economic Development

The average economic growth in East Nusa Tenggara during the Five-Year Development III was 10.5%, while the established target was 8.5%. Compared to that of the Five-Year Development II (7.5%), then there was an increase of 3%. this is because of the increase in regional income. At the end of the Five-Year Development II, the regional income in this territory totalled Rp142,834 million, while in the Five-Year Development III it became Rp173,799 million.

At the end of the Five-Year Development II, income per capita was Rp41,697 (by 1975 constant price), while in the Five-Year Development III it increased to be Rp61,010. Compared to the national income per capita (in 1978 it was Rp138,340, while in 1982 Rp500,000), the East Nusa Tenggara income per capita then is still far from the national average.

The utilization of manpower in East Nusa Tenggara: 1,805,293 people were absorbed in agricultural sector, and 100,061 people (9.22 % of the overall manpower) in industrial sector.

Mental Spiritual Development

The result of population registration in 1980 indicates that 90% of the whole population in East Nusa Tenggara are religious people (the population in this territory in 1981 totalled 2,737,100). The religious life is so far running well and in harmony, though its composition is not in equilibrium: 1,443,358 people adhere to Catholicism, 813,889 Christianity/Protestantism, 229,394 Islam, 1,748 Hinduism and 339 Buddhism.

This good condition of religious life consolidates the social political stability in East Nusa Tenggara. In the Five-Year Development III, the central and regional Governments allocated several funds in order to intensify people's

Penyerapan tenaga kerja di setiap sektor pembangunan di NTT, penyerap terbanyak berada pada sektor pertanian, yaitu sebesar 1.805.293 orang tenaga kerja. Sektor industri menyerap sebanyak 100.061 orang atau 9,22% dari seluruh tenaga kerja.

Pembangunan mental spiritual

Dari hasil registrasi penduduk tahun 1980 diketahui bahwa sekitar 90% penduduk NTT terdiri dari umat beragama (Penduduk NTT tahun 1981 = 2.737.100 jiwa). Kehidupan umat beragama berada dalam keadaan serasi dan harmonis walaupun komposisinya tidak seimbang yaitu: Katholik 1.443.358 jiwa, Kristen/Protestan 813.889 jiwa; Islam 229.394 jiwa; Hindu 1.748 dan Budha 339 jiwa.

Kondisi kerukunan beragama yang baik ini telah menjamin stabilitas sosial politik di NTT. Dalam Pelita III berbagai bantuan dialokasikan baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah dalam usaha menggairahkan dan meningkatkan kesadaran antara lain. Dana bantuan dari Presiden mulai tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 untuk 8 buah mesjid dan 1 buah gereja Kristen Protestan sebesar Rp167.500.000,-.

Melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Agama dari tahun 1979 sampai tahun 1984 telah diberikan bantuan untuk 119 buah gereja Katholik, 56 buah gereja Protestan, 170 mesjid dan 18 pura. Melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi NTT telah diberikan bantuan untuk Rumah Ibadah Katholik, Kristen Protestan, Islam dan Hindu dengan biaya sebesar Rp75.000.000,-. Bantuan dari Menteri Dalam Negeri untuk Mesjid Raya dan pusat Da'wah Ngurussadah Kupang sebesar Rp2.500.000,-.

Akhir Pelita III di Propinsi NTT dibangun sebanyak 1.994 buah SMTP dengan daya tampung 76.036 siswa, yang berarti peningkatan sebesar 43% bila dibandingkan dengan kapasitas tampung di Pelita II. Sedang untuk SMTA sebanyak 70 buah dengan daya tampung 22.030 siswa. Berarti terjadi peningkatan sebesar 42% dan jumlah guru ditingkatkan hingga 34%.

Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, maka dalam Pelita III seluruh kabupaten telah memiliki rumah sakit umum. Untuk mengatasi kekurangan gizi diadakan program perbaikan gizi keluarga. Pelayanan kesehatan terhadap ibu-ibu hamil dan bayi semakin baik, melalui penyuluhan kesehatan yang dilakukan sampai di tingkat desa. Sedangkan untuk pelayanan air bersih belum seluruh penduduk dapat dijangkau. Di pedesaan baru mencapai 20% dan di perkotaan 30%.

Menggerakkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Keberhasilan pembangunan di NTT adalah berkat partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Hal ini nampak khususnya dalam kegiatan pembangunan Desa. Pembinaan partisipasi masyarakat antara lain dengan kegiatan penyuluhan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pedesaan, pembangunan lembaga-desa, dan latihan pembangunan desa terpadu sejak tahun 1981 untuk meningkatkan fungsi LKMD. Target 10 orang KPD tiap desa dilaksanakan kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Flores dan Sumba Timur.

Diadakan kegiatan latihan-latihan/kursus bagi pembinaan dan tim penggerak serta kader PKK di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dengan tujuan untuk menggerakkan PKK. Secara rutin kegiatan tersebut di Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sejak tahun 1972. Kemudian ditingkatkan menjadi program terpadu peningkatan peranan wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (Program Terpadu P2W—KSS). Program tersebut telah mencapai 96 desa binaan dan 24 desa Proyek P2W—KSS di Tahun 1982/1983.

1. Proyek Pelita Nasional di Daerah

Seperti juga dengan pelaksanaan pembangunan Proyek Pelita Nasional di propinsi lain, pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur tetap berpedoman untuk menjaga keserasian antara pembangunan sektoral maupun pembangunan regional, dengan menentukan skala prioritas di bidang Pekerjaan Umum, Pendidikan, Perhubungan, Pertanian, Kesehatan dan Tenaga Kerja. Pekerjaan umum mempunyai prioritas utama Pemda Tk I disebabkan di wilayah Nusa Tenggara Timur sarana dan prasarana jalan, pengairan dan air bersih sangat vital untuk kepentingan dan hajat hidup masyarakat. Kemudian menyusul bidang pendidikan, yang dalam pelita II jumlah anak usia sekolah yang tertampung di Sekolah Dasar (SD) baik Inpres maupun non Inpres sebesar 80,53% dari jumlah anak usia sekolah (7—12 tahun). Namun berkat penambahan jumlah sekolah Dasar Inpres dan bantuan peralatan rehabilitasi pada sekolah swasta, maka dalam Pelita III daya tampung meningkat menjadi 90,35%. Sedangkan bila diban-

religious consciousness; among others, in the form of President's Aid (from 1973 to 1982) for 8 mosques and 1 Christian Protestant churs - totalling Rp167,500,000.

From 1979 to 1984, fund aid deriving from the State Income and Expenditure Budget of Religion Departmen was given to 119 Catholic churches, 56 Protestant churches, 170 mosques and 18 temples. Fund aid from the Regional Income and Expenditure Budget of East Nusa Tenggara (totalling Rp75,000,000) was allocated to the religious places of Catholicism, Protestant Christianity, Islam and Hinduism. Aid from the Minister of Domestic Affairs for Raya Mosque and Ngurassadah Religious Center - Kupang totalled Rp2,500,000.

At the end of the Five-Year Development III, 1,994 units of Junior High School with the capacity of 76,036 students were built. This capacity increased 43%, compared to that in the Five-Year Development II. While for Senior High School, 70 units with the capacity of 22,030 students were built - indicating that there was an increase of 42% and the total of teachers went up by 34%.

So as to enhance people's health and welfare, during the Five-Year Development III all districts were equipped with public hospitals. Programs for the improvement of family's nutrition are held to overcome nutrition deficiency. Helath service for pregnant women and babies is better, and it is done by conducting health promotion in all parts of the territory, including rural areas. So far, not all people could get the service of clean water - 20% for villages and 30% for urban areas.

Activating People's Participation in Development

The success of development in East Nusa Tenggara is due to the participation of its people, both from the planning and until the performance. It is chiefly reflected in rural development activities. The promotion of people's participation is, among others, done by holding programs for the improvement of rural people's knowledge and skill, developing rural institutions and conducting integrated rural development training for the betterment of the function of Rural Community Resilience Institution (done since 1981). The target of 10 "KPD" poeple is implemented in the Districts of Kupang, Southern Central Timor, Northern Central Timor, Belu, Flores and East Sumba.

In order to activati Family Welfare Promotion, trainings/courses are supplied to the activating teams and cadets of Family Welfare Promotion in the provincial, district, sub-district and rural areas. This has been done since 1972. The integrated programs for Promotion of Women's Role for a healthy and prosperous family were carried out in 96 promoted villages and 24 project villages (1982/1983).

1. Sectoral Projects in Regions

Like other provinces, the performance of Sectoral Projects development in East Nusa Tenggara sticks to the harmony between sectoral and regional developments by establishing a priority scale in the fields of Public Works, Education, Communication, Agriculture, Health and Manpower. Public Works dominates the main priority, for roads, irrigation and clean water in East Nusa Tenggara are vital for the human needs. In spite of the fact that during the Five-year Development II the Primary School units (both Inpres and non-Inpres) could only receive 80.53% of the 7-12 year-old students, in the Five-Year Development III they could increase the percentage to be 90.35%. This is because of the addition of the total of Inpres Primary School units and the aid (in the form of rehabilitation equipment) given to private schools. Since the national participation rate is 97.6%, it is then clear that the contribution of East Nusa Tenggara in reaching the national target is sufficiently great. This province had, in the Five-Year Development III, 3,432 units of Primary School and Madrasah Ibtidaiyah Islamic School with 7-12 year-old students totalling 411,743 - those who did not have the opportunity yet to receive education from these schools totalled 53,504.

In the budgetary year of 1985/1986, the budget for Sectoral Projects in East Nusa Tenggara was Rp56,097,205,735. This sum was used to cover 21 sectoral projects specified in the Table II - 1.

In the budgetary year of 1984/1985, the budget for Sectoral Projects totalled Rp47,621,505,640 - the realization until January 31, 1986 reached Rp31,632,897,716 (66.43%) the estimated realization per March 31, 1986 was Rp34,348,288,866 (72.13%) and the rest of the development budget per April 1, 1986 was Rp13,273,216,774 (27.87%). See Table II - 2.

In 1979/1980 East Nusa Tenggara included 141 sectoral projects the cost of which reached Rp19,105,082,560 - the realization until March 8, 1980 was Rp6,918,198,103 (36.21%), while the average physical realization was 43%. In 1981/1982 the State Income and Expenditure Budget established 167 sectoral projects for East Nusa Tenggara, which overally costed Rp39,363,457,190.

dingkan dengan tingkat partisipasi Nasional (NER) adalah sebesar 97,6%. Dengan demikian sumbangan NTT dalam pencapaian sasaran tingkat partisipasi Nasional dinilai cukup besar, dengan jumlah SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam pelita III sebanyak 3.432 buah dengan jumlah murid usia 7—12 tahun yang tertampung sebanyak 411.743 murid dan belum tertampung 53.504 murid.

Hingga tahun anggaran tahun 1985/1986 jumlah anggaran Proyek Pelita Nasional di Nusa Tenggara Timur berjumlah Rp56.097.205.735,- dan untuk membiayai sebanyak 21 proyek sektoral. Untuk proyek-proyek Pelita Nasional yang mendapat prioritas seperti Pekerjaan Umum, mendapat anggaran sebesar Rp19.970.091.000,- menyusul pendidikan sebesar Rp8.932.711.010,-; perhubungan Rp6.277.017.000,-; tenaga kerja sebesar Rp3.813.667.200,-; kesehatan Rp3.198.532.300,- dan pertanian sebesar Rp3.426.777.000,-. (Lihat Tabel II — 1)

Sedang realisasi proyek sektoral/Nasional dalam tahun 1984/1985 dengan jumlah anggaran sebesar Rp47.621.505.640,- dengan realisasi sampai dengan 31 Januari 1986 sebesar Rp31.632.897.716,- dengan prosentase 66,43%, perkiraan realisasi per 31 Maret 1986 sebesar Rp34.348.288.866 dengan prosentase 72,13% dan SIAP (Sisa Anggaran Pembangunan) per 1 April 1986 sebesar Rp13.273.216.774 dengan prosentase 27,87%. Lihat Tabel II — 2

Proyek Pelita Nasional tahun 1979/1980 di Nusa Tenggara Timur terdiri dari 141 buah dengan biaya DIP sebesar Rp19.105.082.560,- sampai dengan tanggal 8 Maret 1980, dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.918.198.103,- atau sebesar 36,21%. Sedangkan realisasi fisik rata-rata 43%. Dalam tahun 1981/1982 di Nusa Tenggara Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menurunkan 167 proyek sektoral dengan keseluruhan biaya berjumlah sebesar Rp39.363.475.190. Jumlah ini berarti naik 69,73% dibandingkan dengan jumlah biaya yang diturunkan pada tahun anggaran 1980/1981 yang terdiri dari 163 proyek dengan jumlah biaya sebesar Rp27.449.303.638,- dengan realisasi fisik proyek (per departemen/lembaga) pada akhir Desember 1981 berkisar antara 3% sampai 50% dengan rata-rata 27,16%. Sedangkan realisasi keuangan berada antara 2% sampai 50% atau rata-rata 20,34%. Tingkat pelaksanaan fisik maupun keuangan yang relatif rendah terutama disebabkan adanya SIAP dari tahun anggaran sebelumnya.

Proyek Penghijauan dan Reboisasi

Dana yang diturunkan sebesar Rp511.350.000,- dengan areal seluas 5.300 Ha untuk penanaman dan pemeliharaan seluas 7.965 Ha, pembibitan sebanyak 2.322.000 anakan dengan jumlah dana Rp56.282.000,- (tahun 1979/1980).

Penghijauan

Dana yang tersedia sebesar Rp920.266.000 untuk areal penanaman seluas 31.590 Ha dan pembibitan sebanyak 9.632.500 anakan dengan jumlah dana sebesar Rp105.370.000,-. Sedang dalam tahun 1981/1982 propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat bantuan Proyek Penghijauan dan Reboisasi, Lihat Tabel II — 3

2. Bantuan Inpres Dati I

Proyek Pelita Dati I Nusa Tenggara Timur dari tahun 1978/1979 hingga tahun 1981/1982 telah menyerap dana sebesar Rp17.901.313.962,- dan menghasilkan 360 buah proyek dengan melibatkan 61 Instansi/dinas. Dengan perincian dalam tahun 1978/1979 jumlah dana sebesar Rp2.062.263.962,- dengan proyek sebanyak 38, dan melibatkan 10 instansi; tahun 1979/1980 jumlah dana sebesar Rp2.850.000.000,- dengan jumlah proyek 76 buah dan melibatkan 14 instansi/dinas; tahun 1980/1981 jumlah dana sebesar Rp5.311.000.000,- dengan jumlah proyek 121 buah melibatkan 18 instansi; dan dalam tahun 1981/1982 jumlah dana sebesar Rp 7.678.050.000,- dengan jumlah proyek 125 buah dan melibatkan 10 instansi.

Program pengembangan wilayah propinsi NTT

Tujuan PPWP—NTT untuk meningkatkan secara langsung pendapatan golongan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah di daerah yang belum berkembang. Terutama dalam rangka peningkatan keselarasan laju pembangunan yang belum cukup ditangani melalui program atau proyek yang dibiayai APBN dan APBD maupun Inpres serta menyempurnakan dan meningkatkan lagi kemampuan bagi Pemda tingkat I dan II. Terutama Bappeda dalam aspek teknis dan organisasi perencanaan, pelaksanaan/implementasi, sistem pelaporan dan pengendalian proyek pembangunan. Termasuk dinas/instansi vertikal tertentu yang memiliki peranan penting di dalam usaha peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah.

Tabel / ***Table II — 1***

REALISASI PROYEK PROYEK SEKTORAL/NASIONAL TAHUN 1985 / 1986
THE REALIZATION OF SECTORAL/NATIONAL PROJECTS - 1985/1986

No	Departemen / *Department*	Anggaran / *Budget*	Realisasi s/d 31 Januari 1986 / *Realization until January 31, 1986*	Prosentase / *Percentage*
1.	Pekerjaan Umum/*Public Works*	19.970.091.000	8.747.976.837	43,81
2.	Kejaksaan Agung/ *Attorney General Office*	108.130.000	39.717.500	36,73
3.	Penerangan/*Information*	698.956.000	40.488.000	5,79
4.	Pariwisata Postel/*Tourism and Post and Telecommunication*	375.547.800	62.022.901	16,52
5.	Perdagangan/*Trade*	296.646.950	140.930.175	47,51
6.	Tenaga Kerja/*Manpower*	3.813.667.200	1.465.165.881	38,42
7.	Perindustrian/*Industry*	243.089.000	173.224.844	69,82
8.	Agama/*Religious Affairs*	394.770.000	46.662.914	11,82
9.	B P S/ *Central Bureau of Statistics*	665.4[illegible]6.000	347.872.000	52,28
10.	Koperasi/*Cooperatives*	679.162.000	490.961.500	72,29
11.	Depdikbud/*Education and Culture*	8.932.711.010	2.278.889.201	24,85
12.	Pertambangan dan Energi/ *Mining and Energy*	1.894.269.000	1.340.214.600	70,79
13.	Perhubungan/*Communication*	6.277.017.000	2.585.944.000	41,20
14.	Sosial/*Social Affairs*	1.659.142.000	542.759.500	32,71
15.	B K K B N/*National Coordinating Board of Family Planning*	739.963.000	720.202.396	97,33
16.	Dalam Negeri/ *Home Affairs*	1.092.638.600	457.341.357	41,86
17.	Kesehatan/*Health*	3.198.523.300	1.336.938.300	41,80
18.	Kehakiman/*Justice*	453.313.000	166.874.000	36,81
19.	Keuangan/*Finance*	133.904.000	6.000.000	4,48
20.	Pertanian/*Agriculture*	3.426.777.000	2.142.985.000	62,54
21.	Kehutanan/*Forestry*	1.038.431.875	623.992.150	60,09
	Jumlah / *Total*	56.097.205.735	23.697.163.056	42,24

This sum indicate an increase of 69.73%, compared to the budget given in the budgetary year of 1980/1981 (Rp27,449,303,638). The sectoral projects in 1980/1981 totalled 163 - physical realization of the projects (per department/institution) ranged from 3% to 50% by the average of 27.16% at the end of December 1981, while the financial realization from 2% to 50% by the average of 20.34%. The relatively-low physical and financial realization was caused by the rest of the development budget resulting from the previous budgetary year.

Regreening and Reafforestation Projects

For this program, the fund required totalled Rp511,350,000 and the area included : 5,300 Ha for planning and 7,965 Ha for maintenance. The seedling amounted to 2,322,000 units with the fund of Rp56,282,000 (1979/1980).

Regreening

The available fund was Rp920,266,000 and used for a planting area of 31,590 Ha. The seedling included 9,632,500 units with the fund of Rp105,370,000. See Table II - 3.

2. Inpres-Aid for Provincial Development Projects

From 198/1979 to 1981/1982, the Sectoral Projects in East Nusa Tenggara required a fund totalling Rp17,901,313,962. This sum produced 360 projects in which 61 official offices were involved. The specification: in 1978/1979 a fund totalling Rp2,062,263,962 was used for 38 projects involving 10 offices; in 1979/1980 a fund totalling Rp2,850,000,000 was used for 76 projects involving 14 offices; in 1980/1981 a fund totalling Rp5,311,000,000 was used for 121 projects involving 18 offices; and in 1981/1982 a fund totalling Rp7,678,050,000 was used for 125 projects involving 10 offices.

Territorial Development Program for the Province of East Nusa Tenggara

The goal of this program is to improve rural people's income directly in undeveloped areas, so that the harmony of development growth which have not been completely reached through the programs or projects of State and Regional Income and Expenditure Budgets or Inpres can be realized. Besides, it is also intended to enhance the abilities of Provincial and District Governments and Regional Planning Board in technical aspects, planning, implementation, reporting system and project controlling - especially the potency of certain vertical official organization holding an essential role in improving rural people's income.

Tabel / *Table II — 2*

REALISASI PROYEK—PROYEK SEKTORAL/NASIONAL TAHUN 1984/1985 (SIAP)
THE REALIZATION OF SECTORAL/NATIONAL PROJECTS — 1984/1985

No	Departemen / *Department*	Anggaran / *Budget*	Realisasi s/d 31 Januari 1986 / *Realization until January 31, 1986*	Prosentase / *Percentage*	Perkiraan Realisasi per 31 Maret 1986 / *Estimated Realization Per March 31, 1986*	Prosentase / *Percentage*	S i a p Per 1 April 1986 / *The Rest of the Development Budget Per April 1, 1986*	Prosentase / *Percentage*
01.	Pekerjaan Umum/ *Public Works*	15.662.572.000	11.439.162.426	73,04	13.380.156.600	85,43	2.282.415.400	14,57
02.	Kejaksaan Agung/ *Attorney General Office*	109.389.000	9.675.000	8,84	16.125.000	14,47	93.264.000	85,26
03.	Penerangan/*Information*	727.197.000	150.004.615	20,63	184.722.155	25,40	542.475.885	74,60
04.	Parpostel/*Tourism and Post and Telecommunication*	246.760.500	167.883.797	68,03	203.172.235	82,34	43.588.265	17,66
05.	Perdagangan/*Trade*	158.400.500	124.434.100	78,56	130.401.500	82,32	27.999.000	17,68
06.	Tenaga Kerja/*Manpower*	4.291.213.500	3.568.244.305	83,15	3.948.807.055	92,02	342.406.445	7,78
07.	Perindustrian/*Industry*	21.475.000	13.969.995	65,05	21.475.000	100	—	—
08.	Agama/*Religious Affairs*	175.150.000	39.690.000	22,66	114.580.000	65,42	60.570.000	34,58
09.	B P S/ *Central Bureau of Statistics*	548.800.000	462.031.000	84,19	548.800.000	100	—	—
10.	Koperasi/*Cooperatives*	631.260.000	578.854.750	91,70	581.681.750	92,15	49.578.250	7,85
11.	Depdikbud/ *Education and Culture*	8.534.783.240	2.825.025.856	33,10	4.965.050.989	58,17	3.569.732.250	41,83
12.	Pertambangan dan Energi/ *Mining and Energy*	45.615.000	45.615.000	100	—	—	—	—
13.	Perhubungan/*Communication*	4.005.347.000	3.489.848.830	87,13	807.978.000	20,17	120.119.170	3
14.	Sosial/*Social Affairs*	1.906.705.000	1.652.255.740	86,65	1.889.090.375	98,92	20.614.625	1,08
15.	B K K B N/*National Coordinating Board of Family Planning*	590.880.000	573.629.430	97,08	573.629.430	97,08	17.829.770	3,01
16.	Dalam Negeri/*Home Affairs*	1.302.778.200	442.591.070	33,97	582.949.347	44,75	719.828.853	55,25
17.	Kesehatan/*Health*	1.799.377.200	1.798.602.670	64,25	1.861.101.670	66,48	938.275.530	33,52
18.	Kehakiman/*Justice*	1.660.400.500	531.020.000	31,98	671.741.000	40,46	988.659.500	59,54
19.	Keuangan/*Finance*	524.396.000	240.646.814	45,89	220.605.300	2,07	303.790.700	57,93
20.	Pertanian/*Agriculture*	3.012.755.000	2.826.969.500	93,83	2.982.970.500	99,01	29.784.500	0,99
21.	Kehutanan/*Forestry*	666.251.000	652.742.811	97,97	666.251.000	100	—	—
	Jumlah / *Total*	47.621.505.640	31.632.897.716	66,43	34.348.288.866	72,13	13.273.216.774	27,87

Tabel / *Table II — 3*

JUMLAH BANTUAN PROYEK PENGHIJAUAN DAN REBOISASI DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1981 / 1982
AID FOR REGREENING AND REAFFORESTATION PROJECTS IN EAST NUSA TENGGARA 1981 — 1982

No Lokasi *Location*	Jenis Proyek / *Kind of Project*							
	Penghijauan *Regreening*		Pembibitan Penghijauan *Seedling Regreening*		Reboisasi *Reafforestation*		Pembibitan Reboisasi *Seedling Reafforestation*	
	Fisik *Area/Ha*	Biaya *Cost*	Fisik *Unit Kg*	Biaya *Cost*	Fisik *Area*	Biaya *Cost*	Fisik *Area/Ha*	Biaya *Cost*
01. Kupang	3.290	215.734	115.390	20.522	174.530	1,445	23.406,50	
02. T T S	2.840	112.154	54.020	17.001	860	157.873	0,78	5.096,62
03. T T U	2.765	168.963	67.875	17.216	670	164.098	2,45	13.025,05
04. B e l u	1.190	84.165	36.200	14.639	650	95.233	0,975	9.680,77
05. A l o r	2.490	114.269	30.400	20.269	1.160	95.013,5	1,60	8.816,40
06. Manggarai	2.990	62.855	750	21.821	1.150	78.409	4,42	15.218,06
07. N g a d a	2.990	63.475	4.800	16.393	1.150	92.481,5	4,81	16.560,83
08. E n d e	2.490	76.117	8.240	17.721	1.500	84.510	4,85	16.711,11
09. S i k k a	2.090	92.560	3.340	24.390	1.000	52.386,25	1,75	5.364,80
10. F l o t i m	1.390	09.289	13.440	15.538	1.130	97.267,75	5,20	15.723,20
11. Sumba Barat	2.390	48.275	30.200	17.119	990	103.218,25	3,03	11.544,37
12. Sumba Timur	2.390	81.542	17.700	13.634	800	73.805,75	0,81	10.411,63
Jumlah / *Total* NTT	30.105	1.299.398	367.105	216.263	—	1.268.826	—	152.540,99

Program dan proyek yang dimulai pada tahun anggaran 1979/1980 memiliki sasaran di tiga kabupaten yaitu: Timor Tengah Utara, Belu dan Alor.

Kabupaten Timor Tengah Utara

Dana yang diperuntukkan bagi kegiatan pelaksanaan ini mulai tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983. Dengan perincian sebagai berikut: tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp85.720.000,-, tahun 1980/1981 sebesar Rp124.988.175,- tahun 1981/1982 sebesar Rp158.519.000,- dan dalam tahun anggaran 1982/1983 sebesar

The program commencing from the budgetary year of 1979/1980 has a target in three districts: Northern Central Timor, Belu and Alor.

The District of Northern Central Timor

The fund supplied for the program in this area is specified: in 1979/1980 totalling Rp85,720,000, in 1980/1981 totalling Rp124,988,175, in 1981/1982 totalling Rp158,519,000 and in 1982/1983 totalling Rp137,195,500.

The afore-said fund was used overally to implement these projects: a) Rural Credit System and Foodstuff Stock, b) Intensification of Farming Production,

Rp137.195.500,-.

Kesemua dana tersebut dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan proyek: a) Sistem Kredit Pedesaan dan Cadangan Bahan Makanan; b) Peningkatan Produksi Usaha Tani; c) Pengembangan Usaha Ternak Potong; d) Pengembangan Usaha Perikanan Rakyat; e) Jaringan Penyuluh Pedesaan; f) Proyek Pengembangan Industri Rakyat; dan g) Penggaraman Rakyat.

Kabupaten Belu

Dana yang diperuntukkan bagi kegiatan pelaksanaan program ini melalui proyek-proyek tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan tahun 1982/1983 dengan perincian sebagai berikut: tahun 1979/1980 jumlah dana sebesar Rp80.182.500,-; tahun 1980/1981 jumlah dana sebesar Rp154.744.550,-; tahun anggaran 1981/1982 dengan jumlah dana sebesar Rp184.267.000,-; dan dalam tahun anggaran 1982/1983 dengan jumlah dana sebesar Rp146.775.950,-.

Kabupaten Alor

Dana yang diperuntukkan bagi kegiatan pelaksanaan program ini melalui proyek-proyek tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan 1982/1983 dengan perincian: tahun anggaran 1979/1980 dengan jumlah dana sebesar Rp80.302.500,-; tahun 1980/1981 dengan dana sebesar Rp159.183.500,-; tahun 1981/1982 dengan jumlah dana sebesar Rp198.675.000,-; dan dalam tahun anggaran 1982/1983 dengan jumlah dana sebesar Rp132.476.000,-.

Dana APBD

Dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1984 melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah diberikan bantuan untuk rumah ibadah Katholik, Kristen Protestan, Islam dan Hindu dengan biaya keseluruhan sebesar Rp75.000.000,-.

Dalam tahun 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan bantuan guna menanggulangi bencana alam sebanyak 4 proyek dengan jumlah dana sebesar Rp61.500.000,-.

Di tahun 1978/1979 memberikan pendidikan kader PKK/P2W—KSS bagi 1.080 kader dengan biaya Rp9.415.000,-.

Dari Proyek Penyantunan Korban Bencana Alam sejak tahun 1978/1979 sampai dengan 1982/1983 telah disantun 1.535 KK dengan jumlah dana sebesar Rp1.576.125.000,-.

3. Bantuan Inpres Daerah Tingkat II

Program Daerah Tingkat (Dati) II untuk jenis proyek yang dilaksanakan dalam Pelita III melalui Inpres adalah Jalan beraspal sepanjang 159,81 Km dan tidak beraspal sepanjang 689,23 Km, jembatan sepanjang 1.007 meter, irigasi (bendungan) 70 buah seluas 29.363 meter dan saluran 28 buah seluas 7.320 meter. Sedangkan untuk pasar 5 buah dengan luas 1.396 meter persegi, riol 10 buah sepanjang 11.875 meter, pencegahan banjir 2 buah seluas 326,7 hektar dan duiker sebanyak 358 buah.

Sedang jumlah dana proyek yang digunakan selama Pelita III adalah sebesar Rp13.175.094.000,00 dengan jumlah proyek 552 buah. Dengan perincian dalam tahun 1979/1980 sebesar Rp1.483.990.000,00 dengan jumlah proyek 95; tahun 1980/1981 jumlah dana sebesar Rp2.077.258.000,00 dengan jumlah proyek 116; dalam tahun 1981/1982 jumlah dana sebesar Rp2.850.715.000,00 dengan jumlah proyek 125; dalam tahun 1982/1983 jumlah dana sebesar Rp3.343.447.000,00 dengan jumlah proyek 110 buah; dan dalam tahun 1983/1984 jumlah dana sebesar Rp3.419.684.000,00 dengan jumlah proyek 106 buah.

Sedangkan dana dan proyek lewat bantuan Inpres Penunjangan Jalan dalam pelita III di Nusa Tenggara Timur berjumlah Rp11.528.997.000,00 dengan jumlah proyek sebanyak 136 buah. Masing-masing untuk tahun 1979/1980 jumlah dana sebesar Rp 632.997.000,00 dengan jumlah proyek 8; tahun 1980/1981 jumlah dana sebesar Rp1.084.000.000,00 dengan jumlah proyek 11; tahun 1981/1982 jumlah dana sebesar Rp3.057.000.000,00 dengan jumlah proyek sebanyak 28; tahun 1982/1983 jumlah dana sebesar Rp3.406.000.000,- dengan jumlah proyek 30 buah; dan dalam tahun 1983/1984 jumlah dana mencapai Rp11.528.997.000,00 dengan jumlah proyek 59 buah. Dari dana tersebut dibangun antara lain jalan sepanjang 1.723,15 Km, jembatan 709 meter dan gorong-gorong seluas 10.788 meter.

Perkembangan Jumlah Dana INPRES

Dalam tahun anggaran 1979/1980 untuk INPRES Kabupaten/Kotamadya jumlah dana sebesar Rp1.483.990.000,00 dengan jumlah

c) Intensification of Slaughter Live-stock Undertaking, d) Intensification of People's Fishery Undertaking, e) Rural Promotion, f) Intensification of People's Industrial Undertaking, and g) People's Salt Undertaking.

The District of Belu

The fund required for this area is specified: in 1979/1980 totalling Rp80,182,500, in 1980/1981 totalling Rp154,744,550, in 1981/1982 totalling Rp184,267,000 and in 1982/1983 totalling Rp146,775,950.

The District of Alor

From the budgetary years of 1979/1980 to 1982/1983, this area required a fund specified: in 1979/1980 totalling Rp80,302,500, in 1980/1981 totalling Rp159,183,500, in 1981/1982 totalling Rp198,675,000 and in 1982/1983 totalling Rp132,476,000.

Fund Deriving from Regional Income and Expenditure Budget

From 1979 to 1984, a fund from Regional Income and Expenditure Budget of East Nusa Tenggara (totalling Rp75,000,000) was distributed to the religious places of Catholicism, Protestant Christianity, Islam and Hinduism.

From 1978/1979 to 1982/1983, the Provincial Government established 4 projects so as th handle natural disasters. The whole fund for these projects totalled Rp61,500,000.

In 1978/1979 to 1982/1983, the Provincial Government established 4 projects so as to handle natural disasters. The whole fund for these projects totalled Rp61,500,000.

In 1978/1979, a fund of Rp9,415,000 was utilized to implement a training program for 1,080 cadets of Family Welfare Promotion/Promotion of Women's Role for a healthy and prosperous family.

From 1978/1979 to 1982/1983, 1,535 families suffering from natural disasters were aided with a fund of Rp1,576,125,000.

3. Inpres-Aid for District Development Projects

The projects conducted in districts during the Five-Year Development III through Inpres-Aid included: asphalted road by 159.81 Km, non-asphalted road by 689.23 Km, bridge by 1,007 m, 70 units of irrigation dam by 29,363 m, 28 units of waterworks by 7,320 m, 5 units of market by 1,396 m², 10 units of sewer by 11,875 m, 2 units of flood prevention by 326,7 Ha and 358 units of culvert.

The fund used for the projects (552 units) during the Five-Year Delopment III totalled Rp13,175,094,000. It is specified: in 1979/1980 totalling Rp1,483,990,000 - used for 95 projects, in 1980/1981 totalling Rp2,077,258,000 - used for 116 projects, in 1981/1982 totalling Rp2,850,715,000 - used for 125 projects, in 1982/1983 totalling Rp3,343,447,000 - used for 110 projects and in 1983/1984 totalling Rp3,419,684,000 - used for 106 projects.

The fund deriving from Inpres-Aid for Roads Supporting during the Five-Year Development III in East Nusa Tenggara amounted to Rp11,528,997,000 and was used to cover 136 projects. It is specified: in 1979/1980 totall... Rp632,997,000 - used for 8 projects, in 1980/1981 totalling Rp1,084,000,000 - used for 11 projects, in 1981/1982 totalling Rp3,057,000,000 - used for 28 projects, in 1982/1983 totalling Rp3,406,00,000 - used for 30 projects and in 1983/1984 totalling Rp11,528,997,000 - used for 59 projects. This whole fund produced: road by 1,723.15 Km, bridge by 709 m and also culvert by 10,788 m.

The Growth of Inpres-Fund

In the budgetary year of 1979/1980, Inpres-Aid for districts development (Kabupaten/Municipality) was Rp1,483,990,000 and used for 89 projects. In 1979/1980, Inpres-Aid for Primary School Development totalled Rp2,112,055,000 and was used to cover 937 projects. This sum produced: 179 new Primary School units, 179 school-guards' houses; 175 official hous for head-masters, 30 classrooms and 195 rehabilitated units of Primary School.

Inpres-Aid for Health Development was Rp369,721,000 and used for 12 districts. This sum resulted in: 27 units of Auxiliary Public Healt Cen..., 7 doctors' houses, 1 unit of "PP", 5 units of "PAH", 16 units of "PM...", 60 units of "SPT dangkal", 50 units of "SPT dalam", 1,500 units of family water-closet and medicine.

Inpres-Aid for Road Supporting in 1979/1980 was Rp632,997,000 and used for 5 districts. It resulted in: road supporting by 106.5 Km (8 projects), the construction of wood bridge by 261 m and bridge supporting by 19 m.

In 1980/1981, Inpres-Aid for Kabupaten/Municipality Developments was Rp2,077,258,000, for Education Development Rp3,950,575,000, for Health

proyek sebanyak 89. Tahun 1979/1980 untuk INPRES Sekolah Dasar (SD) jumlah dana sebesar Rp2.112.055.000,00 dengan jumlah proyek 937. Dengan perincian sebanyak 179 buah pembangunan SD baru, 179 unit rumah penjaga, 175 unit rumah dinas Kepala Sekolah, 30 unit ruang kelas, dan rehabilitasi sebanyak 195 unit SD.

Sedangkan untuk INPRES Sarana Kesehatan jumlah dana sebesar Rp369.721.000,00 digunakan untuk 12 Kabupaten (27 unit Puskesmas Pembantu, 7 unit rumah dokter, 1 unit PP, 5 unit PAH, 16 unit PMA, 60 unit SPT dangkal, 50 unit SPT dalam, 1.500 unit jamban keluarga dan obat-obatan).

Untuk INPRES Penunjang jalan dalam tahun 1979/1980 jumlah dana sebesar Rp692.997.000,00 dipergunakan untuk 5 kabupaten, 8 proyek penunjang jalan 106,5 km, pembangunan jembatan kayu 261 meter dan penunjangan jembatan 19 meter.

Sedangkan dalam tahun 1980/1981 jumlah dana untuk INPRES Kabupaten/Kotamadya sebesar Rp2.077.258.000,00 untuk INPRES Sarana Pendidikan jumlah dana sebesar Rp3.950.575.000,00 untuk INPRES Sarana Kesehatan jumlah dana sebesar Rp607.504.000,00 dan INPRES Penunjang Jalan sebesar Rp1.084.168.000,00.

Sedangkan dalam tahun 1981/1982 untuk INPRES Kabupaten/Kotamadya jumlah dana sebesar Rp2.850.715.000,00, INPRES Sarana Pendidikan sebesar Rp12.331.284.000,00 untuk INPRES Sarana Kesehatan jumlah dana sebesar Rp1.311.039.000, dan untuk INPRES Penunjang Jalan dalam tahun 1981/1982 jumlah dana sebesar Rp3.057.426.000,00.

4. Inpres Bantuan Pembangunan Desa

Inpres Bantuan Pembangunan Desa bertujuan mendorong, mengarahkan, meningkatkan dan membina kehidupan swadaya gotong royong masyarakat. Sekaligus meningkatkan usaha di bidang perekonomian.

Realisasi Bantuan dan Penggunaan

Sejak tahun anggaran 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 pelaksanaan Inpres bantun pembangunan Desa didasarkan atas Inpres dengan jumlah dana di tahun 1978/1979 Inpres No 4/78 sebesar Rp644.755.000,00; tahun 1979/1980 berdasarkan Inpres No 9/79 sebesar Rp818.255.000,00; tahun 1980/1981, Inpres No 3/80 sebesar Rp1.342.790.000,00; tahun 1981/1982, Inpres No 2/81 sebesar Rp1.880.600.000,00 dan dalam tahun 1982/1983, Inpres No 1/82 sebesar Rp2.415.500.000,00. Jumlah dana keseluruhan sebesar Rp7.101.900.000,00.

Dari uraian tersebut terlihat adanya perhatian besar Pemerintah Pusat terhadap pengembangan desa, dengan dana yang diberikan tiap tahun terus meningkat. (Lihat Tabel II — 4).

Development Rp607,504,000 and for Road Supporting Rp1,084,168,000.

In 1981/1982, Inpres-Aid for Kabupaten/Municipality Development was Rp2,850,715,000, for Education Development Rp12,331,284,000, for Health Development Rp1,311,039,000 and for Road Supporting Rp3,057,426,000.

4. Inpres-Aid for Rural Development

This aid is aimed at activating, directing and promoting people's life in making self-efforts and creating mutual help. In addition, it is also intended to enhance economic sector.

Aid Realization and Utilization

From the budgetary years of 1978/1979 to 1982/1983, the realization of Inpres-Aid for Rural Development was based upon: Inpres No 4/78, totalling Rp644,755,000 (in 1978/1979); Inpres No 9/79, totalling Rp818,255,000 (in 1979/1980); Inpres No 3/80, totalling Rp1,342,790,000 (in 1980/1981); Inpres No 2/81, totalling Rp1,880,600,000 (in 1981/1982); and Inpres No 1/82, totalling Rp2,415,500,000 (in 1982/1983). The whole fund totalled Rp7,101,900,000.

From the above-mentioned description, it is then concluded that Central Government pay so much attention to the development of rural areas - nitice the annually increasing fund. See Table II - 4.

Direct Aid Fund

This fund was used to cover the following projects:

a. In 1978/1979, 2,009 villages were accomplished: 507 projects of rural production infrastructure, 372 projects of communication infrastructure, 122 projects of marketing infrastructure and 1,008 projects of social infrastructure. All these projects were implemented in vilages with an investment of Rp1,695,852,041.

b. In 1979/1980, an investment of Rp2,217,886,022 was used to cover 2,305 projects: 665 projects of rural production infrastructure, 665 projects of communication infrastructure and 1,305 projects of marketing infrastructure.

c. In 1980/1981, 4,207 projects were accomplished: 2,124 projects of rural production infrastructure, 137 projects of communication infrastructure, 86 projects of marketing infrastructure and 1,860 projects of social infrastructure. All these projects were realized with an investment of Rp3,541,242,337 - inclusive of the fund used for Family Welfare Promotion materials/equipment (Rp100,000).

d. In 1981/1982, 2,175 projects were accomplished: 779 projects of rural production infrastructure, 209 projects of communication infrastructure,

Tabel / *Table II — 4*

DAFTAR JUMLAH DANA INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DESA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1978/1979 SAMPAI DENGAN 1982/1983
LIST OF INPRES—AIDS FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA - THE BUDGETARY YEARS OF 1978/1979 TO 1982/1983

No	Jenis Kegiatan *Kind of Aid*	Jumlah Dana Tiap Tahun Anggaran *Total Fund in Each Budgetary Year*					Keterangan (Rp)
		1978/1979 (Rp)	1979/1980 (Rp)	1980/1981 (Rp)	1981/1982 (Rp)	1982/1983 (Rp)	(Jumlah) *Sub-Total*
I	Bantuan Langsung/ *Direct Aid*	602.000.000	774.000.000	1.290.000.000	1.720.000.000	2.150.000.000	6.536.000.000
I	Bantuan Paket Proyek UDKP/*Aid for Development Work Area Unit projects*	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
III	Bantuan Khusus bagi Pemenang Perlombaan Desa/*Special Aid for Winners of Rural Development Contests*	13.950.000	13.950.000	22.050.000	66.000.000	66.000.000	181.950.000
IV	Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tingkat Kecamatan/ *Aid for Supervision Aid Administration at Sub-district Level*	6.305.000	6.305.000	12.740.000	19.600.000	24.500.000	69.450.000
	Jumlah / *Total*	624.755.000	797.255.000	1.329.290.000	1.810.600.000	2.245.500.000	6.807.400.000

CATATAN : *Dropping langsung ke Desa Melalui Pemerintah Kabupaten/Bank di Kabupaten*
Direct Dropping in Village through District Government (Kabupaten)/District Bank

Dana Bantuan Langsung

Bantuan langsung dengan kegiatan antara lain dikelola dalam proyek sebagai berikut:

a. Tahun 1978/1979 diselesaikan untuk 2.009 desa dengan perincian; Prasarana produksi desa 507 proyek, prasarana perhubungan 372 proyek, prasarana pemasaran 122 proyek dan prasarana sosial 1.008 proyek. Adapun keseluruhan proyek ini diselesaikan oleh desa-desa dengan nilai Investasi sebesar Rp1.695.852.041,00.

b. Dalam tahun 1979/1980 diselesaikan 2.305 buah proyek dengan perincian; Prasarana produksi desa 665 proyek, prasarana perhubungan 665 proyek dan prasarana pemasaran 1.305 buah proyek. Dengan jumlah Investasi seluruhnya Rp2.217.886.022,00.

c. Dalam tahun 1980/1981 telah diselesaikan 4.207 buah proyek dengan perincian; Prasarana produksi desa 2.124 proyek, prasarana perhubungan 137 proyek, prasarana pemasaran 86 proyek, dan prasarana sosial 1.860 buah proyek. Dengan jumlah Investasi seluruhnya Rp3.541.242.337,00, termasuk dana Rp100.000,- untuk PKK yang digunakan pengadaan bahan-bahan/peralatan PKK.

d. Dalam tahun 1981/1982 diselesaikan 2.175 proyek dengan perincian; Prasarana produksi desa 779 buah proyek, prasarana perhubungan 209 proyek, prasarana pemasaran 78 proyek dan prasarana sosial 1.109 buah proyek. Dengan jumlah Investasi sebesar Rp3.067.485.175,00, termasuk Bantuan untuk PKK Rp200.000,00 dan digunakan untuk pengadaan peralatan/bahan seperti: mesin jahit, peternakan, penghijauan dan lain-lain.

e. Tahun 1982/1983 diselesaikan 384 buah proyek dengan perincian: Prasarana produksi desa 151 buah proyek, prasarana perhubungan 39 buah proyek, prasarana pemasaran 16 buah proyek, dan prasarana sosial 178 buah proyek. Dengan jumlah Investasi seluruhnya Rp2.150.000.000,00, termasuk dana yang disediakan untuk kegiatan PKK Rp250.000,00 dana digunakan untuk kegiatan-kegiatan; pengadaan bahan/peralatan PKK dalam rangka mengembangkan usaha-usaha seperti kerajinan industri rumah tangga, peningkatan gizi berupa tanaman obat-obatan (sayur mayur, peternakan unggas dan sebagainya), pengadaan buku-buku perpustakaan PKK dan latihan kader-kader PKK di desa.

Bantuan Paket Proyek UDKP

Dalam tahun 1978/1979 dengan anggaran Rp22.500.000,00 berhasil dialokasi di 9 Kecamatan proyek UDKP masing-masing Rp2.500.000,00, masing-masing di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Flores Timur, Sikka, Ende, Manggarai dan Sumba Barat. Keseluruhannya untuk membangun gedung serba guna di Kecamatan, Proyek UDKP berfungsi sebagai tempat latihan, kursus, ruangan data, tempat pertemuan masyarakat dan sebagainya. Dari dana ini berhasil dibangun 9 (sembilan) buah gedung serba guna dengan biaya Rp35.190.404,00, termasuk swadaya masyarakat sebesar Rp12.690.404,00.

5. Pembangunan Desa

Kebijaksanaan pembangunan desa di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang relatif tetap adalah: 1 Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam, 2 Pemenuhan keperluan esensial masyarakat, 3 Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat; 4 Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi dan 5 Peningkatan kehidupan ekonomi yang koperatif.

Seluruh kebijaksanaan yang ditempuh diarahkan pada sasaran usaha agar semua desa di Nusa Tenggara Timur menjadi desa Swasembada, dengan tingkat taraf hidup, kesejahteraan masyarakat secara kesinambungan memperlihatkan kenyataan yang makin meningkat. Sistem perencanaan dari bawah (botton up planing) melalui lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tingkat desa dan UDKP di tingkat kecamatan, dengan landasan dasar pemikiran atas pembangunan manusia seutuhnya.

Program dan Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Pembangunan Desa yang dikelola Direktorat Pembangunan Desa di Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1978/1979 sampai dengan 1982/1983 terdiri dari;
1 Program Pengembangan Masyarakat, 2 Program Pembangunan Desa Terpadu, 3 Program Bantuan Pembangunan Desa, 4 Program Pembangunan Khusus, 5 Program Peningkatan Prakarsa dan Swadaya Masyarakat, 6 Program Pemukiman Kembali Penduduk, 7 Program Perbaikan Lingkungan dan Perumahan Desa, 8 Program Bimbingan dan Pembangunan Usaha-usaha Ekonomi Desa, 9 Program Bimbingan dan

78 projects of marketing infrastructure and 1,109 projects of social infrastructure. All these projects were implemented with an investment of Rp3,067,485,175 - inclusive of Family Welfare Promotion fund (Rp200,000) used for such materials/equipment as sewing-machine, animal breeding, regreening, etc.

e. In 1982/1983, 384 projects were accomplished: 151 projects of rural production infrastructure, 39 projects of communication infrastructure, 16 projects of marketing infrastructure and 178 projects of social infrastructure. All these projects were implemented with an investment of Rp2,150,000,000 - inclusive of the fund used for Family Welfare Promotion activities (Rp250,000), such as home industries undertaking, nutrition improvement, library books supplying and cadets training.

Aid for Development Work Area Unit Projects

In 1978/1979, a budget totalling Rp22,500,000 was allocated to 9 Sub-districts in which Development Work Area Unit projects were established. These Sub-Districts are situated in the Districts of Kupang, Southern Central Timor, Northern Central Timor, Belu, East Flores, Sikka, Ende, Manggarai and West Sumba, and each of them received Rp2,500,000. This sum was utilized to build a multi-use hall in every Sub-District (functioning as a place for training centre, course giving, data keeping, public meeting, etc). The construction of the 9 multi use halls costed Rp35,190,404 some of which (Rp12,690,404) resulted from people's self-effort.

5. Rural Development

The relatively regular policy on Rural Development in East Nusa Tenggara includes: 1. The utilization of human resources and natural potency, 2. The implementation of people's essential need, 3. The enhancement of people's self-effort and initiative in creating mutual help, 4. The development of orderly and harmonious rural design, and 5. The improvement of cooperative economic life.

All policy established is directed in such a way the all villages in East Nusa Tenggara can be self-productive and so continuously create prosperous life. A system of bottom-up planning is conducted through Rural Community Resilience Institution (in villages) and Development Work Area Unit (in Sub-Districts) on the basis of refined man development.

Rural Development Programs and Realization

From 1978/1979 to 1982/1983, the Directorate of Rural Development of East Nusa Tenggara held the following Rural Development programs:
1. Program for People Development, 2. Program for Integrated Rural Development, 3. Program for Rural Development Aid, 4. Program for Special Development, 5. Program for the Enhancement of People's Self-Effort and Initiative, 6. Program for People Resettlement, 7. Program for Environmental Improvement and Rural Housing, 8. Program for the Guidance and Development of Rural Economic Undertaking, 9. Program for the Guidance and Development of Rural Financial Institute, and 10. Program for Family Welfare Promotion.

Development of Rural Institution

The growth of rural institution in 1980/1981 was: 53 villages for Institution I (03,08%), 908 villages for Institution II (52,79%) and 759 villages for Institution III (44,76%).

The figures shown in Institution I and Institution II indicate that people's knowledge in dealing with organizations, quantatively, gets better. Qualitatively, however, rural institution in East Nusa Tenggara has not functioned well yet. Since the issue of President's Decree No 28/1980 - concerning the transformation Rural Social Institution into Rural Community Resilience Institution, the growth of rural institution increases continuously from year to year.

The Growth of Development Work Area Unit

In 1979/1980, an aid for Development Work Area Unit projects totalling Rp24,000,000 was allocated to 8 Sub-Districts, each of which received Rp3,000,000 and is situated in Kupang, Southern Central Timor, Belu, Alor, East Flores, Sikka, Ende and East Sumba. It was by this sum and the fund deriving from people's self-effort (totalling Rp9,670,714) that 8 units of multi-use hall were built in the Sub-Districts concerned.

In 1980/1981, an aid for Development Work Area Unit projects totalling Rp18,000,000 was allocated to 4 Sub-Districts. each of which received Rp4,500,000 and is situated in Northern Central Timor, Ngada, Manggarai and West Sumba. This sum plus the fund deriving from people's self-effort (Rp14,100,000) was used to build 4 halls.

In 1981/1982, an aid of Rp75,000,000 was allocated to 15 Sub-Districts in which Development Work Area Unit projects were established. These Sub-

Pengembangan Lembaga Desa dan 10 Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pengembangan Lembaga Desa

Tingkat perkembangan kelembagaan desa tahun 1980/1981 adalah L 1 sejumlah 53 desa atau 03,08%; L 2 sebanyak 908 desa atau 52,79% dan L 3 sejumlah 759 desa atau 44,76%.

Angka yang menunjukkan 980 desa (L2) dan 759 (L3) menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat untuk berorganisasi secara kuantitatif semakin meningkat. Namun secara kualitatif, perkembangan kelembagaan desa di propinsi Nusa Tenggara Timur belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No 28/1980 tentang penyempurnaan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), maka perkembangan LKMD dari tahun ke tahun terus meningkat.

Proyek Pengembangan UDKP

Dalam tahun 1979/1980 bantuan berupa Paket Proyek UDKP sebesar Rp24.000.000,- dialokasikan pada 8 kecamatan UDKP, masing-masing Rp3.000.000,- terdapat di Kupang, TTS, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende dan Sumba Timur dan berhasil membangun 8 buah gedung serba guna di kecamatan UDKP. Terlihat pula dana dari swadaya masyarakat sebesar Rp9.670.714,-.

Tahun 1980/1981 dalam bentuk Paket UDKP Rp 18.000.000,- yang dialokasikan pada 4 Kecamatan UDKP. Masing-masing di Kabupaten Timor Tengah Utara, Ngada, Manggarai dan Sumba Barat Rp4.500.000,- untuk membangun 4 buah gedung, sedang swadaya masyarakat Rp14.100.000,-. Tahun 1981/1982 dengan dana Paket Rp75.000.000,- dialokasi pada 15 Kecamatan UDKP, masing-masing Rp5.000.000,- dan berhasil dibangun 15 buah gedung meliputi 12 Kabupaten. Tahun 1982/1983 dana yang disediakan dalam Paket sebesar Rp175.000.000,- dialokasikan pada 35 buah Kecamatan UDKP di 12 Kabupaten masing-masing Rp5.000.000,-.

Dilaksanakan sesuai petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa dari Menteri Dalam Negeri melalui Instruksinya No 28/1982 yang menetapkan penggunaannya seperti untuk: melengkapi prasarana lingkungan Desa dimana terdapat Proyek pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa (APBN) sebesar Rp1.000.000,- Digunakan sebagai bantuan pelengkap program terpadu dengan proyek-proyek sektoral lainnya antara lain dari Pertanian, Perindustrian, Koperasi, Binaguna dan sebagainya yang besarnya Rp500.000 per kecamatan; Dengan dana Rp1.500.000,- digunakan untuk mengadakan 1 buah kendaraan roda dua dan 1 buah mesin ketik ukuran 18 — 20 inc untuk Kecamatan yang bersangkutan; Dana sebesar Rp100.000,- dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan disuksi UDKP/Team Kerja LKMD di tingkat Kecamatan; dan sebesar Rp1.900.000,- diperuntukkan membangun proyek-proyek ekonomi Desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembinaan Prasarana Desa

Dalam tahun anggaran 1978/1979 di Propinsi Nusa Tenggara Timur dimukimkan sebanyak 1.258 KK dibiayai Banpres sebesar Rp69.250.000,-, APBN Rp110.000.000 dan dari APBD Rp118.500.000; Tahun 1979/1980 pemukiman dilaksanakan di Desa Konga (Flotim) untuk 100 KK dengan APBN Rp60.000.000,-, tahun 1980/1981 dimukimkan 456 KK dengan biaya APBN sebesar Rp288.300.000,-, tahun 1981/1982 dimukimkan 375 KK dengan biaya Rp357.803.000 dari APBD sebesar Rp125.000.000,- dan dalam tahun 1982/1983 dengan biaya APBN sebesar Rp333.000.000,- digunakan untuk 140 KK korban bencana alam gunung api Rokatenda, pembinaan 150 KK Mautenda, pembinaan 250 KK di Mbay (Ngada) dan pembinaan 130 KK di Manggarai. (Lihat Tabel II — 5)

Pembiayaan

Pembiayaan program/kegiatan pembangunan Desa di Nusa Tenggara Timur, sejak tahun 1978/1979 sampai tahun 1982/1983 diperoleh dana yang bersumber dari APBN, APBD tingkat I Nusa Tenggara Timur, Inpres set serta dana-dana lainnya seperti dari UNICEF dan Swadaya masyarakat. Khusus sumber dana berasal dari APBN dan APBD adalah untuk APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berjumlah Rp614.001.000,- dan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sebesar Rp891.750.000 (Lihat Tabel II — 6)

Lomba Desa

Penilaian secara keseluruhan pelaksanaan Lomba Desa tingkat Propinsi dan Kabupaten dari tahun 1978/1979 sampai dengan tahun 1982 adalah sebagai berikut: Tingkat Propinsi 5 tahun dengan juara I sebanyak 5 desa hadiah proyek sebesar Rp 13.150.000,-; juara II sebanyak

Districts are situated in 12 Kabupaten and produced 15 halls. And, in 1982/1983, 35 Sub-Districts in 12 Kabupaten were given an aid totalling Rp175,000,000, each of which received Rp5,000,000.

On the basis of Domestic Affairs Minister's Decree No28/1982 - concerning the realization of Rural Development Aid, it was established: Rp1,000,000 for the completion of rural environment infrastructure in the spot of rural environment and housing rehabilitation project, Rp500,000 per Sub-District used as a supplementary aid for the programs integrated with such sectoral projects as Agriculture, Industry, Cooperative, etc, Rp1,500,000 for the purchase of 1 unit of two-wheel vehicle and 1 unit of 18-20-inc-sized typewriter, Rp100,000 for costing the discussion of Development Work Area Unit and the Working Team of Rural Community Resilience Institution in Sub-District, and Rp1,900,000 for establishing rural economic projects which were aimed at increasing people's income.

Promotion of Rural Infrastructure

In the budgetary year of 1978/1979, 1,258 families were settled with the integrated funds of Banpres (Rp69,250,000), State Income and Expenditure Budget (Rp110,000,000) and Regional Income and Expenditure Budget (Rp118,500,000). In 1979/1980, 100 families were settled in Konga Village (East Flores) at a cost of Rp60,000,000 deriving from State Income and Expenditure Budget. In 1980/1981, 456 families were settled at a cost of Rp288,300,000 (State Income and Expenditure Budget). In 1981/1982, 375 families were settled at a cost of Rp357,803,000 and Rp125,000,000 (Regional Income and Expenditure Budget). And, in 1982/1983, a cost of Rp333,000,000 (State Income and Expenditure Budget) was utilized for 140 families suffering from the natural catastrophe of Mount Rokatenda and for the promotion of 150 families in Mautenda, 250 families in Mbay (Ngada) and 130 families in Manggarai. See Table II - 5.

Tabel / *Table II — 5*

DATA PELAKSANAAN PEMUKIMAN KEMBALI PENDUDUK
TAHUN 1978/1979 S/D 1982/1983
REALIZATION OF PEOPLE RESETTLEMENT 1978/1979 TO 1982/1983

	Jumlah Kepala Keluarga *Total of Families*		Jumlah Biaya *Total of Cost*	
TAHUN *Year*	APBN *State Income and Expenditure Budget*	APBD *Regional Income and Expenditure Budget*	APBN *State Income and Expenditure Budget*	APBD *Regional Income and Expenditure Budget*
1978/1979	1.183	75	1.179.250.000,-	118.500.000,-
1979/1980	100	—	60.000.000,-	—
1980/1981	406	50	288.300.000,-	30.000.000,-
1981/1982	375	—	357.803.000,-	125.000.000,-
1982/1983	140	—	333.000.000,-	—

Sumber Data: Buku Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 1978 s/d 1983 hal 184

Data Source : The Report Book of the Governor of East Nusa Tenggara Written in the Period of 1978 - 1983, Page 184.

Cost

The funds used to cover the programs/activities of Rural Development in East Nusa Tenggara from 1978/1979 to 1982/1983 were derived from State Income and Expenditure Budget, Regional Income and Expenditure Budget of East Nusa Tenggara, Inpres and other sources like UNICEF and people's self-effort. State Income and Expenditure Budget contributed Rp614,001,000, while Regional Income and Expenditure Budget Rp891,750,000. See Table II - 6.

Rural Competition

The performance of Rural Competition in the period of 1978/1979 - 1982/1983 was evaluated as follows: For Province (5 years): champion I: 5 villages, awarded Rp13,150,000; champion II: 5 villages, awarded Rp11,100,000; champion III: 5 villages, awarded Rp8,600,000. For District (5 years): champion I: 60 villages, awarded Rp324,000,000: champion II: 60 villages, awarded Rp255,000,000; champion III: 60 villages, awarded Rp186,000,000. All the prizes totalled Rp797,850,000. See Table II-7.

6. Inpres-Aid for Regreening and Reafforestation

Under Inpres No 14 of 1979, in the year of 1979/1980 the Province of East Nusa Tenggara received an Inpres-Aid for Regreening and Reafforestation Programs which included: 1. Reafforestation Project, 2. Project of Reafforestation Seedling, 3. Regreening Project, 4. Project of Regreening Seedling. The fund supplied for the realization of these projects totalled Rp1,060,258,000 and was used to implement: greenery planting by 13,590 Ha, 2 units of

Tabel / *Table II — 6*

SUMBER DANA / *SOURCE OF FUND*

No	Tahun Anggaran / *Budgetary Year State*	Sumber Dana/*Found* APBN *Income and Expenditure Budget*	APBD *Regional Income and Expenditure Budget*	Keterangan *Remarks*
1.	1978/1979	53.741.000,-	164.750.000,-	
2.	1979/1980	84.289.000,-	44.000.000,-	
3.	1980/1981	193.772.000,-	74.500.000,-	
4.	1981/1982	194.763.000,-	348.500.000,-	
5.	1982/1983	87.836.000,-	260.000.000,-	
	Jumlah / *Total*	614.001.000,-	891.750.000,-	

Sumber Data : Dari Kantor Direktorat Pembangunan Desa Prop NTT
Data Source : The Directorate of Rural Development of East Nusa Tenggara

5 desa hadiah sebesar Rp11.100.000,-; juara III sebanyak 5 desa hadiah proyek sebesar Rp8.600.000,-. Untuk tingkat kabupaten (5 tahun) dengan juara I sebanyak 60 desa hadiah proyek sebanyak Rp324.000.000,-; juara II sebanyak 60 desa hdiah proyek Rp255.000.000,- dan juara III sebanyak 60 desa hadiah proyek sebesar Rp186.000.000,- dengan jumlah keseluruhan dana sebesar Rp797.850.000,- (Lihat Tabel II — 7)

6. Inpres Penghijauan Dan Reboisasi

Berdasarkan Inpres No 14 tahun 1979, maka dalam tahun 1979/1980 Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat bantuan Program Inpres Penghijauan dan Reboisasi dengan 4 jenis proyek. Masing-masing: 1 Proyek Reboisasi; 2 Proyek Pengadaan Bibit Reboisasi; 3 Proyek Penghijauan; dan 4 Proyek Pengadaan Bibit Penghijauan.

Dana yang tersedia untuk pelaksanaan ke—4 proyek tersebut berjumlah Rp1.060.258.000,-. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan penanaman penghijauan 13.590 ha, pembuatan check dan 2 buah persemaian bibit penghijauan 9.632.500, penanaman reboisasi 5.380 ha, pemeliharaan tanaman reboisasi 7.965 ha, persemaian bibit reboisasi 2.322.000 anakan, pemeliharaan persemaian bibit reboisasi 12.160.000 anakan, pembelian biji-bijian reboisasi 16400 kg, pembinaan di tingkat propinsi dan pengadaan tenaga petugas lapangan/teknis sebanyak 92 orang.

Dalam tahun 1984/1985 jumlah dana sebesar Rp 1.774.784.000,-, dengan realisasi sebesar Rp1.744.096.452,50.

Di tahun 1985/1986 jumlah dana sebesar Rp 1.395.020.000,-, dengan realisasi Rp1.080.135.567,- (Lihat Tabel II — 8)

7. Program Bantuan Kredit Pembangunan Dan Pemugaran Pasar

Program bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar mulai dilaksanakan di Propinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun anggaran 1976/1977 dengan Instruksi Presiden No 8 Tahun 1976 dan berlangsung hingga tahun anggaran 1978/1979. Dengan perincian investasi untuk tahun anggaran 1976/1977 (Inpres 8 Tahun 1976) dengan dana sebesar Rp480.000.000,-; untuk tahun 1977/1978 (Inpres 7 Tahun 1977) dengan dana sebesar Rp600.000.000,-; untuk tahun anggaran 1978/1979 (Inpres 9 tahun 1978) dengan dana sebesar Rp 677.017.000,-; sementara untuk tahun anggaran 1979/1980 dan tahun anggaran 1980/1981 tidak ada kredit bantuan.

Dalam tahun 1976/1977 dengan dana sebesar Rp480.000.000,- dialokasikan pada 6 daerah tingkat II, masing-masing Kupang, Belu, Sikka, Ende, Manggarai dan Sumba Timur. Dengan perincian telah dibangun 11 buah pasar yang menampung 3.025 pedagang.

Di tahun anggaran 1977/1978 berdasarkan dana Rp600.000.000,- daerah tingkat II yang mendapat bantuan kredit adalah : Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara Alor, Flores Timor dan Sikka, Ngada, Manggarai, Sumba Timur dan Sumba Barat. Berhasil dibangun 16 buah pasar dan dapat menampung sebanyak 2.865 pedagang.

Sedang dalam tahun 1978/1979 sebesar Rp677.017.000,- mencakup 12 Kabupaten dan telah dibangun 32 pasar. Dapat ditampung sebanyak 4.078 pedagang.

Pelaksanaan program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar, sejak Pelita II (dari tahun anggaran 1976/1977, 1977/1978, dan 1978/1979) memperoleh bantuan Kredit sebesar Rp1.800.000.000,-. Jumlah bantuan kredit tersebut dialokasikan untuk 12 daerah tingkat II tersebar di tingkat Kabupaten sampai tingkat Kecamatan. (Lihat Tabel II — 10).

Tabel / *Table II — 7*

DAFTAR HASIL PARA JUARA LOMBA DESA TINGKAT PROPINSI SELAMA 5 TAHUN BERTURUT-TURUT
LIST OF RURAL COMPETITION CHAMPIONS FOR PROVINCIAL LEVEL FOR THE SUCCESSIVE 5 YEARS

Tahun Perlombaan *Year of Competition*	Klasifikasi Kejuaraan *Classification of Champions*	Desa *Village*	Kecamatan *Sub-District*	Kabupaten *District*
1. 1978/1979	I	Sallu	Miomafo Barat	TTU
	II	Mandosawu	Lamba Leda	Manggarai
	III	Uledolumole	Bajawa	Ngada
2. 1979/1980	I	Tuawolo	Adonora Timur	Flotim
	II	Ampera	Alor Barat Laut	A l o r
	III	Taekas	Miomafo Timur	TTU
3. 1980/1981	I	Ponain	Amarasi	Kupang
	II	Kakor	Ruteng	Manggarai
	III	Naikasa	Tasifeto Barat	B e l u
4. 1981/1982	I	Lakmaras	Lamaknen	B e l u
	II	Nggalakleleng	Lamba Leda	Manggarai
	III	Reworena	E n d e	E n d e
5. 1982/1983	I	Lambunga	Adonara Timur	Flotim
	II	Kuluan	Biboki Utara	T T U
	III	Binafun	Amfoang Selatan	Kupang

Sumber : Kantor Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Lebih lanjut kejuaraan Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
Source : The Directorate of Rural Development of East Nusa Tenggara.

greenery seedling by 9,632,500, reafforestation planting by 5,380 Ha, maintenance of reafforestation plants by 7,965 Ha, reafforestation seedling by 2,322,000, maintenance of reafforestation seedling by 12,160,000, purchase of reafforestation seeds by 16,400 Kg, promotionin provincial level and provision of operational instructurs/technicians by 92 people.

In 1984/1985, the fund supplied was Rp1,774,784,000, while the realization totalled Rp1,744,096,452.50.

In 1985/1986, the fund supplied was Rp1,395,020,000 while the realization Rp1,080,135,567. See Table II-8.

7. Credit Aid Program for Markets Development and Rehabilitation

This kind of program was conducted in East Nusa Tenggara from the budgetary years of 1976/1977 (under Inpres No 8 of 1976) to 1978/1979. The specification is : in 1976/1977 (under Inpres No 8 of 1976), totalling Rp480,000,000; in 1977/1978 (under Inpres No 7 of 1977), totalling Rp600,000,000; in 1978/1979 (under Inpres No 9 of 1978), totalling Rp677,017,000; and in the budgetary years of 1979/1980 and 1980/1981, no credit aid was given.

In 1976/1977, the fund totalling Rp480,000,000 was allocated to 6 Districts (Kupang, Belu, Sikka, Ende, Manggarai and East Sumba), with which 11 markets (with the capacity of 3,025 traders) were built.

In 1977/1978, the fund totalling Rp600,000,000 was allocated to the Districts of Kupang, Southern Central Timor, Northern Central Timor, Alor, East Flores, Sikka, Ngada, Manggarai, East Sumba and West Sumba. It resulted in 16 markets with the capacity of 2,865 traders.

In 1978/1979, the fund totalling Rp677,017,000 was allocated to 12 Kabupaten and produced 32 markets with the capacity of 4,078 traders.

The Credit Aid Program for Markets Development and Rehabilitation during the Five-Year Development II (the budgetary years of 1976/1977, 1977/1978 and 1978/1979) was implemented at a fund of Rp1,800,000,000. This sum was allocated to 12 Districts. See Table II-10.

From the credit fund of Rp720,000,000 (the budgetary year of 1978/1979), a total of Rp677,017,000 was derived and allocated to Sub-Districts for markets development and rehabilitation.

The credit fund allocated in the budgetary years of 1982/1983 and 1983/1984 totalled Rp2,943,000,000.

Inpres-Aid for Primary School Development

Most of the Inpres Primary School projects (at a fund of Rp20,598,000,000) in 1982/1983 were carried out by puny entrepreneurs. Only several projects (costing approximately 2,25% of the whole fund) were done by strong entrepreneurs, for the former were not able to conduct them.

In 1984/1985, the fund supplied was Rp17,098,237,500, while the realization Rp13,336,330,050. In 1985/1986, it became Rp17,373,952,500 with the realization of Rp6,583,937,380. See Table II - 11.

Tabel / *Table II — 8*

INPRES PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN ANGGARAN 1984/1985 DAN 1985/1986 PER 31 MARET 1986
INPRES—AID FOR REGREENING AND REAFFORESTATION IN THE BUDGETARY YEARS OF 1984/1985 AND 1985/1986 PER MARCH 31, 1986

No Kabupaten *District*	Dana *Fund*	Realisasi *Realization*	%	Sisa *Rest*
Tahun Anggaran 1984/1985 *The Budgetary Year of 1984/1985*				
1. Belu	25.562.000	25.652.000	100	—
2. Ngada	347.952.000	349.952.000	100	—
3. Ende	21.560.000	21.560.000	100	—
4. Alor	23.927.000	18.865.300	78,84	5.061.700
5. Timor Tengah Utara	148.371.000	140.300.400	94,56	8.070.540
6. Kupang	821.628.000	817.961.592,50	99,55	3.666.407,50
7. Flores Timur	21.598.000	16.128.000	74,67	5.469.400
8. Sikka	122.909.000	122.909.000	100	—
9. Ruteng	28.918.000	28.918.000	100	—
10. Timor Tengah Selatan	137.812.000	135.643.700	98,42	2.168.300
11. Sumba Timur	17.182.000	17.182.000	100	—
12. Sumba Barat	89.407.000	83.155.800	93	6.251.200
Jumlah / *Total*	1.774.784.000	1.744.096.452,50	98,27	30.687.547,50
Tahun Anggaran 1985/1986 *The Budgetary Year of 1985/1986*				
1. Belu	38.727.000	38.727.000	100	—
2. Ngada	298.471.750	236.389.150	79,19	62.082.600
3. Ende	17.366.000	17.366.000	100	—
4. Alor	20.896.000	17.898.400	85,28	2.997.600
5. Timor Tengah Utara	87.094.000	65.521.310	64,89	30.572.690
6. Kupang	551.370.000	364.099.873	66,03	187.270.127
7. Flores Timur	15.888.000	15.888.000	100	—
8. Sikka	45.438.750	43.718.750	96,21	1.720.000
9. Manggarai	82.255.000	82.255.000	100	—
10. Timor Tengah Selatan	188.692.000	159.152.584	84,34	29.540.416
11. Sumba Timur	—	—	—	—
12. Sumba Barat	49.000.500	48.299.500	98,56	701.000
Jumlah / *Total*	1.395.020.000	1.080.135.567	77,42	314.884.433

Tabel / *Table II — 10*

Tahun Anggaran *Budgetary Year*	Jumlah Dana (Rp 000) *Total of Fund (in thousand rupiah)*	Jumlah Proyek (buah) *Total of Projects (units)*	Daya Tampung (orang) *Capacity (people)*	Realisasi (%) *Realization (%)*	Keterangan *Remark*
1976/1977	Rp 480.000	11	2.247	100	Utk 6 Dati II
1977/1978	Rp 620.000	16	2.960	100	Utk 10 Dati II
1978/1979	Rp 720.000	30	8.750	*)	Utk 17 Dati II
Jumlah / *Total*	Rp 1.800.000	57	8.257	75	

*) Dari dana kredit sebesar Rp720.000.000,- untuk Tahun Anggaran 1978/1979 telah dapat dialokir sebesar Rp677.017.000,- untuk Pembangunan dan pemugaran pasar-pasar di tingkat Kecamatan.
Sedang dana kredit pasar yang dialokasikan untuk tahun anggaran 1982/1983 dan tahun 1983/1984 adalah sebesar Rp2.943.000.000,-.

Inpres SD

Pelaksanaan Inpres Sekolah Dasar tahun 1982/1983 dengan dana sebesar Rp20.598.000.000,- dikerjakan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah kecuali beberapa sekolah dasar (sekitar 2,25% dari seluruh anggaran) yang terpaksa diserahkan pelaksanaannya kepada ekonomi kuat karena ekonomi lemah tidak sanggup melaksanakannya.

Dalam tahun 1984/1985 dengan dana sebesar Rp17.098.237.500,- dengan realisasi Rp13.336.330.050,-.

Dalam tahun 1985/1986 dengan jumlah dana sebesar Rp17.373.952.500,- dengan realisasi sebesar Rp6.583.937.380,- Lihat Tabel II-11.

Tabel / *Table II — 11*

INPRES SEKOLAH DASAR PER 31 MARET 1986
INPRES—AID FOR PRIMARY SCHOOL DEVELOPMENT PER MARCH 31, 1986

No Kabupaten *District*	Dana *Fund*	Realisasi *Realization*	%	Sisa *Rest*
Tahun Anggaran 1984/1985 *The Budgetary Year of 1984/1985*				
1. Belu	1.212.107.500	1.139.002.550	93,96	13.104.950
2. Ngada	1.023.455.000	481.910.400	47,08	541.544.000
3. Ende	1.601.932.000	1.601.932.000	100	—
4. Alor	953.497.000	953.497.000	100	—
5. Timor Tengah Utara	971.082.000	785.199.025	80,35	185.882.975
6. Kupang	2.025.579.500	1.358.256.560	67,05	667.317.940
7. Flores Timur	1.573.720.500	1.247.749.145	79,28	325.971.355
8. Sikka	1.489.149.000	1.315.948.455	88,36	173.200.545
9. Ruteng	2.502.620.000	1.807.911.125	72,24	694.708.875
10. Timor Tengah Selatan	1.781.469.500	1.545.140.240	86,73	236.329.360
11. Sumba Timur	894.186.000	412.182.030	46,09	482.003.950
12. Sumba Barat	1.069.444.500	687.601.500	64.29	381.843.000
Jumlah / *Total*	17.098.237.500	13.336.330.050	80	3.761.907.450
Tahun Anggaran 1985/1986 **The Budgetary Year of 1985/1986**				
1. Belu	844.814.500	319.018.900	37,76	525.795.600
2. Ngada	1.373.803.000	529.829.600	38,56	843.973.400
3. Ende	1.309.366.500	711.924.419,50	54,37	597.442.080,50
4. Alor	981.852.500	911.064.204	92,85	70.788.296
5. Timor Tengah Utara	749.953.500	148.903.800	19,85	601.049.700
6. Kupang	2.251.206.500	1.115.468.533,28	44,24	1.405.737.966,72
7. Flores Timur	1.326.801.000	382.113.398,40	28,79	944.687.601,60
8. Sikka	1.271.176.000	1.074.498.725	82,52	196.677.275
9. Manggarai	2.298.551.000	204.520.000	8,89	2.094.031.000
10. Timor Tengah Selatan	2.096.349.000	679.178.400	32,39	1.417.170.600
11. Sumba Timur	1.085.050.000	201.268.000	18,54	883.782.000
12. Sumba Barat	1.515.029.000	306.149.400	20,20	1.208.879.600
Jumlah / *Total*	17.373.952.500	6.583.937.380,18	37,98	10.790.015.119,82

8. Pembangunan Berbantuan Lainnya

Bantuan Program Pengembangan Wilayah Propinsi (PPWD) PDP II Nusa Tenggara Timur

"Provincial Area Development Program" (PDP) merupakan suatu program pembangunan sebagai perwujudan dari kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat lewat Organisasi Bantuan Internasional US — AID. Anggaran pembangunan yang disalurkan lewat APBD I merupakan dana tandingan/"Counter Budget" dari dan bantuan US—AID dengan perbandingan 1 : 2, 1 (satu) bagian APBD I dan 2 (dua) bagian US—AID. PDP juga dikenbal sebagai Program Pengembangan Wilayah Propinsi (PPWP).

Untuk administratif, penyaluran uang dilakukan lewat cara dan pedoman pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk tahun anggaran 1982/1983, INMENDAGRI belum

8. Developments from Other Aids

Aid for Provincial Area Development Program (PDP) II In East Nusa Tenggara

"Provincial Area Development Program" (PDP) is a development program indicating the manifestation of cooperation between IndonesianGovernment and US Government of cooperation between Indonesian Government and US Government which is done through US International Aid Organization. The development budget deriving from Regional Income and Expenditure Budget I is called a "Counter Budget" of US Aid by the ratio of 1 : 2 (1 is the proportion of Regional Income and Expenditure Budget I, while 2 is US Aid).

The financial realization is conducted under Domestic Affairs Minister's Instruction. In the budgetary year of 1982/1983 this Instruction was not issued yet, so that the projects to be done could not be implemented. In addition, in the "Memory of Understanding" between Indonesian Government and US Government it is stated that Provincial Regional Planning Board is responsible for the planning and implementation coordination.

PPWP ran for 4 budgetary years, commencing in 1979/1980 and terminating in 1982/1983, and was realized only in 1979/1980 and 1980/1981

dikeluarkan, sehingga belum dapat diperoleh suatu kepastian tentang proyek-proyek yang dapat dikerjakan. Lain dari itu, dalam "Memory of Understanding" antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat, juga dinyatakan bahwa Bappeda Tingkat I bertanggung jawab terhadap koordinasi perencanaan dan pelaksanaan baik koordinasi instansi/dinas yang bersangkutan maupun terhadap Kabupaten.

PPWP sudah berjalan sejak tahun anggaran 1979/1980 dan akan berlangsung selama 4 tahun anggaran, yang dalam tahun anggaran 1982/1983 akan menjadi tahun anggaran terakhir. Yang baru dilaksanakan efektif hanya untuk 2 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1979/1980 dan 1980/1981. Keterlambatan terutama disebabkan terlambatnya pengesahan proyek-proyek oleh Tim Pembina Pusat di Jakarta.

Untuk tahun anggaran 1981/1982, pengesahan anggaran proyek-proyek baru siap pada Nopember 1981, sehingga praktis hanya beberapa proyek saja yang sudah dikerjakan.

Cara pembayaran yang digunakan US — AID adalah cara pembayaran kembali/"Reimbursement". Artinya: Proyek-proyek dibiayai terlebih dahulu dengan uang Pemerintah Indonesia dan kalau dievaluasi oleh US — AID, proyek-proyek berhasil, barulah bagian tanggung jawab mereka dibayar. Atas dasar itu, nilai proyek yang dibayar kembali dapat dijadikan suatu ukuran keberhasilan, karena sebelum dievaluasi, US — AID melakukan monitoring yang efektif sekali langsung ke lokasi-lokasi proyek yang bersangkutan dengan menempatkan 2 orang konsultan tetap, beberapa konsultan sementara dan Tim Monitoring khusus yang didatangkan dari Washington Amerika Serikat.

Untuk Tahun Anggaran 1979/1980, proyek yang belum dibayar kembali adalah Proyek Evaluasi External yang dikontrakkan kepada Universitas Nusa Cendana Kupang, sedangkan untuk tahun anggaran 1980/1981 ada 14 proyek.

Nusa Tenggara Timur (NTT) Livestock Development Proyect Besi Pae

Dana proyek ini diperoleh dari kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Dengan perincian dalam tahun 1981/1982 dari pihak Indonesia sebesar Rp70.000.000,00 dan Australia A $ 2.427.050,; Tahun 1982/1983 dari Indonesia sebesar Rp130.000.000,00 dan Australia tanpa dana. Dalam tahun 1983/1984 dari Indonesia dananya sebesar Rp270.000.000,- dan Australia nihil. Kemudian dalam tahun 1985/1986 dari pihak Indonesia sebesar Rp900.000.000,00 sementara dan dari pihak Australia sebesar A $ 3,330,000.

9. Inpres Kesehatan

Pembangunan Puskesmas Inpres di daerah ini dalam Pelita III mencapai 127 buah Puskesmas, namun jangkauan pelayanan kesehatan baru mencapai 19.13% dari target.

Dalam Tahun Anggaran 1984/1985 jumlah dan sebesar Rp1.008.113.000,- sampai 31 Maret 1986 sebesar Rp790.968.959,20.

Tahun 1985/1986 jumlah dana sebesar Rp852.742.000 dengan realisasi per 31 Maret 1986 sebesar Rp462.197.032,60. Lihat Tabel II—12

10. Inpres Bantuan Penunjangan Jalan

Dalam Tahun Anggaran 1984/1985 jumlah dana sebesar Rp3.036.100.000,- dengan realisasi per 31 Maret 1986 sebesar Rp2.926.596.488,78.

Tahun 1985/1986 jumlah dana sebesar Rp3.588.000.000,- dengan realisasi Rp2.468.756.900,- (Lihat Tabel II — 13)

11. Agraria/Pertanahan

Kebijaksanaan pokok bidang agraria sejak tahun 1978 hingga tahun 1983 adalah Catur Tertib bidang Pertanahan sebagai pelaksanaan dari Tap MPR No IV/MPR/1978. Catur Tertib dijadikan landasan sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali, penguasaan dan pemilikan tanah serta program-program khusus bidang Agraria. Untuk menunjang usaha meningkatkan kemampuan dan potensi petani-petani tidak bertambah atau mempunyai tanah sangat sempit.

Adapun Catur Tertib bidang pertanahan terdiri dari : Tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah dan Tertib Pemeliharaan Tanah serta Lingkungan Hidup.

Bidang Tata Guna Tanah

Proyek Tata Guna Tanah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berasal dari APBN tiap tahun anggaran menunjukkan peningkatan.

(effectively). This was because of the delay in projects legalization by Central Promotion Team, Jakarta.

For the budgetary year of 1981/1982, projects legalization was finished in November 1981. Consequently, it was only several projects that could practically be accomplished.

The method of paying applied by the US Aid is "Reimbursement", which means that projects are at first covered with the cost spent by Indonesian Government. Then they are evaluated by US Aid. If the evaluation is successful, the projects are paid back by the latter. On this basis, the value of a reimbursed project can be considered a success, for prior to the evaluation the US Aid monitors very effectively by assigning two fixed consultants, several temporary consultants and Monitoring Team in the project soncerned. These persons are directly from Washington, USA.

For the budgetary year of 1979/1980, the project which was not reimbursed yet was External Evaluation Project contracted to Nusa Cendana University Kupang, while for 1980/1981, 14 projects were not reimbursed yet.

East Nusa Tenggara Livestock Development - Besi Pae Project

The fund for this project derives from the cooperation between Indonesian Government and Australian Government. It is specified: in 1981/1982, Indonesian fund totalling Rp70,000,000 and Australian A$2,427,050; in 1982/1983, Indonesian Rp130,000,000 and Australian no gund; in 1983/1984, Indonesian Rp270,000,000 and Australian no fund; and in 1985/1986, Indonesian Rp900,000,000 and Australian A$3,330,000.

9. Inpres-Aid for Health Development

In spite of the fact that during the Five-Year Development III 127 units of Inpres Public Health Centre were built in East Nusa Tenggara, health service only reached 19.13% of the target.

In the budgetary year of 1984/1985, the fund intended for this program totalled Rp1,008,113,000, while the realization per March 31, 1986 was Rp790,968,959.20. In 1985/1986, it was Rp852,742,000 with the realization per March 31, 1986 totalling Rp462,197,032.60. See Table II - 12.

Tabel / *Table II — 12*

INPRES KESEHATAN PER 31 MARET 1986
INPRES—AID FOR HEALTH DEVELOPMENT PER MARCH 31, 1986

No Kabupaten *District*	Dana *Fund*	Realisasi *Realization*	%	Sisa *Rest*
Tahun Anggaran 1984/1985 ***The Budgetary Year of 1984/1985***				
1. Belu	75.310.000	75.310.000	100	—
2. Ngada	71.160.000	23.480.000	33	47.680.000
3. Ende	79.500.000	79.480.000	99,99	50
4. Alor	119.344.000	117.205.142	98,20	2.138.258
5. Timor Tengah Utara	60.420.000	60.420.000	100	—
6. Kupang	104.095.000	46.367.250	44,54	57.727 .750
7. Flores Timur	75.025.000	75.025.000	100	—
8. Ruteng	111.019.000	111.019.000	100	—
9. Sikka	72.675.000	72.573.925	99,86	101.075
10. Timor Tengah Selatan	85.695.000	85.936.500	99,96	28.500
11. Sumba Timur	91.015.000	22.633.092,20	24,86	68.381.907,80
12. Sumba Barat	62.585.000	21.498.500	34,35	41.086.500
Jumlah / *Total*	1.008.113.000	790.968.959,20	78,46	217.144.040,80
Tahun Anggaran 1985/1986 ***The Budgetary Year of 1985/1986***				
No Kabupaten *District*	Dana *Fund*	Realisasi *Realization*	%	Sisa *Rest*
1. Belu	49.625.000	49.615.860	99,98	9.140
2. Ngada	57.477.000	14.571.080	25,35	42.905.920
3. Ende	63.730.000	5.118.160	8,03	58.611.840
4. Alor	86.106.000	77.835.320	90,39	8.270.680
5. Timor Tengah Utara	54.619.000	54.619.000	100	—
6. Kupang	99.325.000	15.144.593	15,24	84.180.407
7. Flores Timur	120.954.000	118.169.113,60	97,69	2.784.886,40
8. Sikka	94.706.000	72.375.636	72,42	22.330 364
9. Manggarai	52.933.000	3.948.220	7,45	48.984.780
10. Timor Tengah Selatan	61.122.000	6.605.000	10,80	54.517.000
11. Sumba Timur	55.168.000	24.760.700	44,88	30.407.300
12. Sumba Barat	56.977.000	19.434.350	34,10	37.542.650
Jumlah / *Total*	852.742.000	462.197.032,60	50,17	390.544.967,40

Tabel / *Table II — 13*

INPRES BANTUAN PENUNJANGAN JALAN PER 31 MARET 1986
INPRES—AID FOR ROADS SUPPORTING PER MARCH 31, 1986

Tahun Anggaran 1984/1985
The Budgetary Year of 1984/1985

No Kabupaten *District*	Dana *Fund*	Realisasi *Realization*	%	Sisa *Rest*
1. Belu	209.900.000	209.900.000	100	—
2. Ngada	256.500.000	256.500.000	100	—
3. Ende	168.000.000	156.070.925	92,89	11.929.075
4. Alor	265.500.000	265.600.000	100	—
5. Timor Tengah Utara	224.500.000	224.500.000	100	—
6. Kupang	462.300.000	421.810.473,78	91,24	40.489.526,22
7. Flores Timur	218.200.000	218.200.000	100	—
8. Sikka	188.000.000	138.824.090	73,84	49.175.910
9. Ruteng	303.200.000	303.200.000	100	—
10. Timor Tengah Selatan	292.000.000	292.000.000	—	
11. Sumba Timur	254.000.000	246.091.000	96,88	7.909.000
12. Sumba Barat	194.000.000	194.000.000	100	—
Jumlah / *Total*	3.036.100.000	2.926.596.488,78	96,39	109.503.511,22

Tahun Anggaran 1985/1986
The Budgetary Year of 1985/1986

No Kabupaten *District*	Dana *Fund*	Realisasi *Realization*	%	Sisa *Rest*
1. Belu	236.000.000	236.000.000	100	—
2. Ngada	260.000.000	260.000.000	100	—
3. Ende	170.000.000	40.706.000	23,94	129.294.000
4. Alor	270.000.000	210.704.500	78,03	59.295.500
5. Timor Tengah Utara	340.000.000	75.992.050	22,35	264.007.950
6. Kupang	672.000.000	520.492.400	77,45	151.507.600
7. Flores Timur	230.000.000	230.000.000	100	—
8. Sikka	200.000.000	64.545.450	32,27	135.454.550
9. Manggarai	335.000.000	153.966.000	45,96	181.034.000
10. Timor Tengah Selatan	405.000.000	403.210.000	99,55	115.159.500
11. Sumba Timur	265.000.000	149.840.500	56,54	115.159.500
12. Sumba Barat	205.000.000	123.300.000	60,14	81.700.000
Jumlah / *Total*	3.588.000.000	2.468.756.900	68,80	1.119.243.100

Dalam tahun 1978/1979 sebesar Rp30.000.000,-; tahun 1979/1980 sebesar Rp49.000.000,-; tahun 1980/1981 sebesar Rp112.000.000,- tahun 1981/1982 sebesar Rp 150.000.000,- dan dalam tahun 1982/1983 sebesar Rp129.000.000,-.

Kegiatan yang dilaksanakan pemetaan penggunaan tanah kota (Kotamadya, Kabupaten, Kota Kecamatan), pemetaan penggunaan tanah skala 1 : 250.000; 1 : 100.000 dan skala 1 : 50.000; pembuatan peta kerja dan pemetaan status tanah, pengukuran luas penggunaan tanah dengan skala 1 : 100.000 dan skala 1 : 250.000.

Untuk proyek penyusunan rencana Induk Tata Guna Wilayah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun 1980/1981 sebesar Rp7.500.000,-; tahun 1981/1982 sebesar Rp30.000.000,- dan dalam tahun 1982/1983 sebesar Rp13.000.000,-.

Dengan hasil yang dicapai survei lapangan selesai diseluruh kabupaten se Nusa Tenggara Timur, kecuali Kabupaten Flores Timur dan Sikka. Dengan penggambaran selesai 75% dan analisa data 40%.

Bidang Landreform

Dana yang dipersiapkan untuk bidang ini berasal dari Yayasan Dana Landreform. Dalam tahun 1978/1979 sebesar Rp7.320.000,-; tahun 1979/1980 sebesar rp5.740.000,-; tahun 1981/1982 sebesar Rp26.184.000,-; dan dalam tahun 1982/1983 sebesar Rp26.500.000,-. Hasil yang dicapai untuk penerbitan landreform, dihasilkan Buku A yang memuat seluruh data pelaksanaan landreform di seluruh kabupaten. Dari Buku A dihasilkan Buku B, berupa data yang disempurnakan/disesuaikan dengan keadaan fisik lapangan.

Kegiatan pembinaan petani landreform di Kabupaten Kupang dilaksanakan di Kecamatan Kupang Tengah yaitu di Tarus, dengan membantu para petani dengan bibit, pembasmi hama, pupuk dan perbaikan saluran pengairan. Perjanjian bagi hasil kegiatannya dalam taraf pelaksanaan (inventarisasi), demikian pula retribusi tanah obyek landreform. Pendataan tanah perkebunan partikulir selesai dilaksanakan di Kabupaten Sikka terhadap tanah bekas konsensi Nangahale dan Erfpacht Maumere yang hasilnya: (a) tanah yang dikonsensi petani penggarap 222 KK dengan luas tanah 141.1763 Ha; (b) tanah yang dikuasai Dinas Kehutanan 0.0480 Ha; (c) tanah yang dikuasai Dinas

Inpres-Aid for Roads Supporting

In the budgetary year of 1984/1985, the fund supplied for this program totalled Rp3,036,100,000, while the realization per March 31,1986 was Rp2,926,596,488.78. In 1985/1986, it was Rp3,588,000,000 with the realization of Rp2,468,756,900. See Table II - 13.

10. Agrarian Affairs

Under the Decree of People's Consultative Assembly No IV/MPR/1978, the basic policy applied for agrarian affairs from 1978 to 1983 is called Four Orders for Land. It is aimed at the rearrangement and ownership of land and other special programs for agrarian affairs. Besides, it is also intended to enhance farmers' abilities, especially those having very narrow lands.

The Four Orders for Land consists of Land Legal Order, Land Administrative Order, land Use Order and Land and Living Environment Preservation Order.

Land Use Design

In East Nusa Tenggara, Land Use Design projects deriving from State Income and Expenditure Budget show an annual increase. In 1978/1979, the fund amounted to Rp30,000,000; in 1979/1980 Rp49,000,000; in 1980/1981 Rp112,000,000; in 1981/1982 Rp150,000,000; and in 1982/1983 Rp129,000,000.

The activity conducted was the mapping of urban land use (Municipality, Kabupaten and Sub-District) on the scales of 1 : 250,000, 1 : 100,000 and 1 : 50,000; while working map and land status map were made on the soales of 1 : 100,000 and 1 : 250,000.

Projects for the main planning of Area Design were completedc through Regional Income and Expenditure Budget. In 1980/1981, the fund totalled Rp7,500,000, in 1981/1982 Rp30,000,000 and in 1982/1983 Rp13,000,000.

Field survey was accomplished in all Districts of East Nusa Tenggara, except in East Flores and Sikka. The drawing was finished 75%, while data analysing 40%.

Landreform

The fund prepared for this program derived from Landreform Funding Foundation. In 1978/1979, it totalled Rp7,320,000, in 1979/1980 Rp5,740,000, in 1981/1982 Rp26,184,000 and in 1982/1983 Rp26,500,000. The achievement was in the form of Book A which contains data on the realization of landreform in all Districts. this Book A then resulted in Book B which compiles data perfected/adapted to the physical conditionof the field.

The promotion of landreform farmers was done in the Sub District of Central Kupang - Tarus, Kabupaten Kupang, by supplying them with seeds, insecticides, fertilizers and irrigation canals. Data on private horticultural land were collected from the District of Sikka for the ex-land mutually agreed upon by Nangahale and Erfpacht Maumere and resulted in: a. 141.1763 Ha of land cultivated by 222 farmers; b. 0.0480 Ha of land under the authority of Forestry Department; c. 0.0627 Ha of land under the authority of Social Department; d. 2.0000 Ha of land used for Inpres Primary School; and e. 10.0000 Ha of land under the authority of Paroki Talibura - The entire extent of the land was 153.2870 Ha.

The fund (deriving from State Income and Expenditure Budget) prepared for Land Titles Arrangement projects was: in 1978/1979 Rp4,000,000; in 1979/1980 Rp10,000,000; in 1980/1981 Rp20,000,000; in 1981/1982 Rp35,000,000; and in 1982/1983 Rp40,000,000.

The projects for land squaring and releasing costed: in 1978/1979 Rp5,000,000; in 1979/1980 Rp8,000,000; and in 1982/1983 Rp100,000,000. The total fund deriving from both State and Regional Income and Expenditure Budgete was Rp302,000,000. The routine activities resulted in 11,647 certificates of land titles in an area of 6.5762 Ha. and, the establishment of income/administrative cost amounted to Rp319,478,398.25.

The projects funded by State Income and Expenditure Budget issued 485 land title-deeds for 3,676 subjects in an area of 1.937.5643 Ha. The establishment of income/administrative cost was Rp44,205,375.

PRONA Agrarian Special Service

It resulted in the issue of 544 land title-deeds for 3,952 subjects in an area of 1.888.5631 Ha. The establishment of income/administrative cost was Rp11,742,000.

Regional Project

It produced 64 land title-deeds for 1,193 subjects in an area of 537.2960 Ha. The establishment of income/administrative cost was Rp14,329,125.

Sosial 0.0627 Ha; (d) tanah yang dipergunakan SD Inpres 20.000 Ha; dan (e) tanah yang dikuasai Paroki Talibura 100.000 Ha. Jumlah luas keseluruhan 153.2870 Ha.

Untuk Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-hak Tanah, dana yang dipersiapkan dari APBN dalam tahun 1978/1979 sebesar Rp4.000.000,-, tahun 1979/1980 sebesar Rp10.000.000,- tahun 1980/1981 sebesar Rp20.000.000,-; tahun 1981/1982 sebesar Rp35.000.000,- dan tahun 1982/1983 sebesar Rp40.000.000,-.

Sedang Proyek Penerbitan Hak-hak Tanah, pengkaplingan dan pembebasan tanah dalam tahun 1978/1979 sebesar Rp5.000.000,-, tahun 1979/1980 sebesar Rp8.000.000,- dan dalam tahun 1982/1983 sebesar Rp100.000.000,-. Sedang jumlah dana baik melalui APBN maupun APBD sebesar Rp302.000.000,-. Dari kegiatan rutin dihasilkan surat keputusan hak yang diterbitkan 11.647 subyek hak dengan luas tanah 6.5762 Ha. Sementara untuk penetapan uang masuk/biaya administrasi berjumlah Rp319.478.398,25.

Kegiatan proyek melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berhasil diterbitkan 485 SKP untuk 3.676 subyek hak dengan luas tanah 1.937.5643 Ha. Dengan penetapan uang pemasukan/biaya administrasi sebesar Rp44.205.375,-

P r o n a

Surat keputusan yang diterbitkan sebanyak 544 SKP dengan 3.952 subyek hak dan luas tanah 1.888.5631 Ha. Untuk penetapan uang pemasukan/biaya administrasi sebesar Rp11.742.000,-.

Proyek Daerah

Proyek penerbitan hak-hak tanah surat keputusan yang diterbitkan sebanyak 64 SKP dengan subyek 1.193 subyek hak dan luas tanah 537.2960 Ha. Sedangkan untuk penetapan uang pemasukan/biaya administrasi sebesar Rp14.329.125,-.

Proyek pengkaplingan tanah berhasil untuk pembebasan dan pengkaplingan 1.460 bidang dengan luas lokasi 201 Ha.

Menunjang Proyek Instansi

Berhasil diterbitkan 52 SKP untuk 1.592 subyek hak dengan luas tanah 958.5729 Ha, dengan penetapan uang pemasukan/biaya administrasi sebesar Rp6.293.958,75.

Bidang Pendaftaran Tanah

Dana yang dipersiapkan berasal dari APBN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp185.264.000,- dengan perincian untuk tahun 1978/1979 sebesar Rp8.000.000,-; tahun 1979/1980 sebesar Rpo13.000.000,-; tahun 1980/1981 sebesar Rp23.000.000,-; tahun 1981/1982 sebesar Rp112.000.000,-; dan dalam tahun 1982/1983 sebesar Rp29.264.000,-.

Proyek Peningkatan Prasarana Phisik Agraria

Dana yang berasal dari APBN dengan perincian sebagai berikut: tahun 1979 - 1980 sebesar Rp30.000.000,- untuk pembangunan gedung kantor Agraria Kabupaten Ende; Tahun 1980/1981 sebesar Rp30.000.000,- untuk pembangunan gedung kantor Agraria Belu tahun 1981—1982 sebesar Rp66.000.000,- untuk pembangunan gedung Kantor Agraria Ngada dan Alor, dan tahun 1982 - 1983 sebesar Rp41.250.000,- untuk pembangunan gedung kantor Agraria Kabupaten Kupang.

12. Peranan Wanita dan PKK

Kebijaksanaan pembinaan Wanita di Propinsi NTT diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai aspek sesuai dengan keperluan, dengan sasaran utama wanita di tingkat pedesaan. Guna menunjang pelaksanaan program di bidang operasional pembinaan wanita di Propinsi NTT, diadakan 3 pendekatan pokok. Yaitu dengan cara pendekatan ekonomi, pendekatan institusi dan pendekatan kultural.

Pendekatan sosial ekonomi

Wanita di Nusa Tenggara Timur dilihat dari sisi ini mempunyai tugas yang sangat berat. Karena disamping sebagai penanggungjawab urusan rumah tangga, mempunyai fungsi di bidang Ekonomi yang meliputi : tenaga kerja dalam lapangan pertanian; industri rumah tangga, sosial budaya dan lain-lain.

Peranserta kaum wanita dalam bidang ini sangat ditentukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Pendekatan dari sudut ini akan sangat memudahkan dan meringankan beban tugas kaum wanita terutama di tingkat pedesaan, dimana penanganan masalah ini melalui Program PKK sebagai bagian integral dari Lembaga Ketahanan

The projects for land squaring and releasing resulted in 1,460 plots in an area of 201 Ha.

Supporting Office Project

52 land title-deeds were issued for 1,592 subjects in an area of 958.5729 Ha. The establishment of income/administrative cost totalled Rp6,293,958.75.

Land Registration

The whole fund derived from State Income and Expenditure Budget and amounted to Rp185,264,000. It is specified: in 1978/1979 Rp8,000,000; in 1979/1980 Rp13,000,000; in 1980/1981 Rp23,000,000; in 1981/1982 Rp112,000,000; and in 1982/1983 Rp29,264,000.

Enhancement of Agrarian Physical Infrastructure

The fund derived from State Income and Expenditure Budget and is specified: in 1979/1980, totalling Rp30,000,000, used for the construction of agrarian office in the District of Ende; in 1980/1981, totalling Rp30,000,000, used for the construction of agrarian office in the District of Belu; in 1981/1982, totalling Rp66,000,000, for the construction of agrarian offices in the Districts of Ngada and Alor; and in 1982/1983, totalling Rp41,250,000, used for the construction of agrarian office in the District of Kupang.

11. Women's Role and Family Welfare Promotion

The policy for women promotionin the Province of East Nusa Tenggara is projected to improve knowledge and skills in any aspect in accordance with the need and has the main target of rural women. So as to support the performance of this program, 3 fundamental approaches are put into practice, is economic, institutional and cultural.

Social-Economic Approach

Viewed from this aspect, East Nusa Tenggara women shoulder very heavy duties. Because, besides being responsible for the household affairs, they have a quite important role in economic field (dealing with agriculture, home industries, social-cultural field, etc).

Women's participation in this field is chiefly determined by the knowledge and skills they own. The social-economic approach is meant to lessen the difficulties burdening them (especially rural women) in carrying out their duties. It is realized through Family Welfare Promotion programs, for they are an integral part of Rural Community Resilience Institution program. In the budgetary year of 1978/1979, the 10 Main Programs of Family Welfare Promotion were interpreted in the form of Crash Program of East Nusa Tenggara Healthy Family, which then promoted to be a program called Promotion of Women's Role for A healthy and Prosperous Family. The last mentioned one is a cross-sectoral program conducted in integration and has 4 groups of principal activities as follows :

a. Group of Basic Activities : fight against illiteracy; agricultural promotion; immunization/vaccination; nutrition; housing and rural environment rehabilitation; the supplying of clean water facilities and family water-closets; population and family planning; mutual self-efforts in cleanliness, health, accomodation and living environment.

b. Group of Continued Activities : promotion of women's role in cooperatives; motivation guidance for the promotion of women's role and function; promotion of skills in home industries and self-undertaking.

c. Group of Supporting Activities : training courses on the integrated programs of Promotion of Women's Role for A Healthy and Prosperous Family in provincial, kabupaten, sub-district and rural levels; information.

d. Group of Special Activities : promotion of rural social infrastructure (Rural Community Resilience Institution); rural infrastructure.

To make possible the realization and continuity of Family Welfare Promotion/Promotion of Women's Role for A Healthy and Prosperous Family programs in villages, the following are conducted:

a. The formation of Family Welfare Promotion activating team in provincial, kabupaten and sub-district levels - in accordance with Domestic Affairs Minister's Instruction No 225 of 1980.

b. The training of Family Welfare Promotion/Promotion of Women's Role for A Healthy and Prosperous Family cadets. it is specified: in 1978/1979, totalling 1,080 cadets, at a fund of Rp9,415,000, Regional Income and Expenditure Budget; in 1979/1980, totalling 1,080 cadets, at a fund of Rp36,000,000, State Income and Expenditure Budget; in 1980/1981, totalling 1,100 cadets, at a fund of Rp21,000,000, UNICEF; in

Masyarakat Desa (LKMD). Pada tahun anggaran 1978/1979, penjabaran dari kegiatan 10 Program Pokok PKK dituangkan dalam bentuk Crash Program Keluarga Sehat Nusa Tenggara Timur yang kemudian ditingkatkan menjadi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan program lintas sektoral dan dilaksanakan secara terpadu dengan 4 (empat) kelompok kegiatan utama yakni :

a. **Kelompok Kegiatan Dasar,** yang meliputi:
   Pemberantasan Buta Huruf dalam arti luas;
   Penyuluhan Pertanian dengan aneka usaha tani;
   Imunisasi/vaksinasi.
   Taman gizi.
   Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa.
   Jamban keluarga serta pengadaan fasilitas air bersih.
   Kependudukan dan Keluarga Berencana.
   Kegiatan swadaya gotong royong untuk kebersihan, kesehatan dan pemukiman serta lingkungan hidup.
b. **Kelompok Kegiatan Lanjutan,** yang meliputi:
   Peningkatan peranan wanita di bidang perkoperasian.
   Latihan motivasi untuk meningkatkan peranan dan fungsi wanita.
   Peningkatan ketrampilan di bidang industri rumah tangga dan kewiraswastaan.
c. **Kelompok Kegiatan Penunjang,** yang meliputi:
   Latihan/kursus program terpadu P2WKSS di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
   Kegiatan Penerangan.
d. **Kelompok Kegiatan Khusus,** yang meliputi:
   Peningkatan infra Struktur Sosial di Desa (LKMD).
   Prasarana desa.

Untuk memungkinkan terlaksananya, kelangsungan serta kemandirian pelaksanaan kegiatan PKK/P2WKSS di desa, dilakukan:

a. Pembentukan tim penggerak PKK tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 225 tahun 1980.
b. Pendidikan Kader PKK/P2WKSS dengan perincian sebagai berikut: tahun 1978/1979 kader yang dididik 1.080 orang dengan dana Rp9.415.000,00, sumber dana APBD; tahun 1979/1980 kader yang dididik 1.080 orang, dana Rp36.000.000, sumber APBN; tahun 1980/1981 kader yang dididik 1.100 kader, dana Rp21.000.000,00 sumber UNICEF; tahun 1981/1982 kader yang dididik 1.104, dengan dana Rp54.500.000,00 dan dalam tahun 1982/1983 dididik 1.276 orang, dengan dana Rp55.000.000,00. Keseluruhan kader yang dididik 5.640 orang, dengan jumlah dana Rp175.915.000,00.

Pendekatan Institusi

Upaya peningkatan peranan wanita tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan lembaga pembinaan wanita. Untuk itu diupayakan mendorong dan memberi ruang gerak yang memungkinkan wadah pembinaan wanita melakukan kegiatan pembinaan dengan sasaran utama wanita pedesaan, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi. Mendorong dan menciptakan kemungkinan adanya kerja sama instansional, antara organisasi kewanitaan dengan instansi pemerintah maupun swasta. Sinkronisasi dan keterpaduan program diantara berbagai komponen yang terlihat dalam kegiatan pembinaan wanita dilaksanakan melalui rapat Konsultasi, Temu karya dan lain-lain, (Instansi Pemerintah, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, IKKH, BPOW, BPKKS, PKBI, PMI, Koperasi Serba Usaha Wanita Cendana dan lain-lain).

Dari bukti nyata kerja sama telah nampak berhasil ditingkat Propinsi terbentuk "Koperasi Serba Usaha Wanita Cendana" didirikan tahun 1981 berstatus Badan Hukum. Wanita Nusa Tenggara Timur telah pula dilibatkan dalam berbagai kegiatan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan Badan Pembina Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan Sosial (BPKKS).

Pendekatan Kultural ·

Salah satu hambatan dalam upaya peningkatan peranan Wanita di Nusa Tenggara Timur adalah hambatan kultural yang kurang menunjang berperansertanya kaum wanita secara optimal dalam berbagai aspek masalah kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan usaha peletakan dasar bagi kegiatan pembinaan selanjutnya. Seperti:

a. Lomba kegiatan PKK di bulan April 1981 dengan tujuan merangsang peningkatan kegiatan PKK.
b. Konsolidasi kegiatan PKK melalui MUSDA PKK, Rapat Konsultasi dan Temu Karya pada tahun 1981.
c. Penyelenggaraan Lokakarya KKB, Kesehatan dan Gizi antar Wanita se Nusa Tenggara Timur dengan peserta 28 orang tahun 1981.
d. Mengirimkan 9 orang ke Solo, Jawa Tengah, mengikuti latihan penelitian di desa bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera

1981/1982, totalling 1,104 cadets, at a fund of Rp54,500,000; and n 1982/1983, totalling 1,276 cadets, at a fund of Rp55,000,000. The overall trained cadets totalled 5,640 and were funded Rp175,915,000.

Institutional Approach

Efforts of enhancing women's role will certainly relate to women promotion institutions, for these are the place in which they can develop their motivation and activities. The approach is aimed at rural women, civil servants' wives and soldiers' wives and is projected to create a possible cooperation between women organization and governmental/private offices.

In fact, the cooperation has indicated a success in provincial level. This can be provd by the existence of "Cendana Women's Multi-Enterprising Cooperative" established in 1981 with the status of Legal Body. In addition, East Nusa Tenggara women have also been involved in such activities as Indonesian Family Planning Association and Social Activities Coordinating and Controlling Body.

Cultural Approach

One of the difficulties in efforts of promoting women's role in East Nusa Tenggara is in the form of cultural obstacle. The result of this is that women do not contribute their optimal participation in various aspects concerning society affairs. The activities held in this approach are, in majority, used as a undamental step for the next promotion program. They include:

a. Competition in Family Welfare Promotion activities, done in April, 1981, aimed at arousing these activities.
b. Consolidation of Family Welfare Promotion activities, by means of Regional Discussion, Consultative Meeting and Work Consultation, done in 1981.
c. Workshop of Family Planning, Health and Nutrition among women of East Nusa Tenggara, followed by 28 participants, done in 1981.
d. Dispatch of 9 people to Solo, Central Java to take rural investigation training, cooperating with Indonesia Sejahtera Foundation, funded by Asian Foundation.
e. Workshop of Family Nutrition Enhancement Effort in sub-districts, aimed at supplying society with motivation and information on the importance of family nutrition.
f. Dispatch of 4 people to Tawangmangu, Central Java to take Packet A Training, aimed at improving trainers' knowledge and skills in the field of Society Development.
g. Formation of five weaving work groups to be dispatched to Bali.
h. Formation of 'Family Welfare Promotion' Promoted Village functioning as a sampling village.
i. Consultative Meeting of Provincial level Women Organizations, intended to probe Social Welfare efforts, followed by 11,120 prominent women, resulting from the cooperation between Women Organization and East Nusa Tenggara Social Department.
j. Distribution of production stimuli, exact-use equipment and motivation stimuli to 360 poor women and 30 prominent women in 6 districts of East Nusa Tenggara.
k. Women's Skills Training, involving 375 women, aimed at creating women's self-efforts in the Districts of Kupang, Southern Central Timor, Northern Central Timor, East Sumba, West Sumba and Ngada.
l. Women Leadership Training in provincial, kabupaten, sub-district and rural levels.
m. Participation in educational promotion for Infact-Schools initiated by civil servants' wives. In 1983, Infant-Schools managed by civil servants' wives totalled 4 units (provincial level) and 37 units (kabupaten level).

Realization of Family Welfare Promotion Activities during the Five-Year Development II

1. Data Collecting

Family Welfare Promotion was firstly known by East Nusa tenggara people in the beginning of the Five-Year Development II, ie after it was promoted to be a national program in relation to rural development. Far prior to that, it was only heard in schools as Family Welfare Education.

Up to 1976, the activities performed simply reached the phase of designing, which had the possibility of being applied in East Nusa Tenggara.

In the period of 1977, the following efforts were applied so as to solidify Family Welfare Promotion programs:

– making regional visits,
– holding cross-sectoral meetings with hoth government representatives and society.

The data collected then were used to figure out the main problem existing in East Nusa Tenggara, so that the current and future strategy for the programs could be confirmed.

(dana dari Asia Fondation).

e. Lokakarya UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga) di Kecamatan-kecamatan, yang bertujuan memberi penerangan dan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi keluarga.
f. Mengirimkan 4 orang untuk mengikuti Latihan Paket A di Tawamangu — Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelatih dalam bidang Pengembangan Masyarakat.
g. Telah dibentuk lima kelompok kerja dalam bidang Pertenunan mengadakan wisata karya ke Bali.
h. Pembentukan Desa Binaan PKK yang berfungsi sebagai Desa Percontohan.
i. Pertemuan Konsultasi Organisasi Wanita Tingkat Propinsi dalam rangka penjajakan usaha Kesejahteraan Sosial sebanyak 11.120 tokoh Wanita yang merupakan kerja sama Organisasi Wanita dengan Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur.
j. Pemberian stimulasi sarana produksi, peralatan tepat guna dan Stimulasi sarana motivasi bagi 360 orang wanita miskin dan 30 orang tokoh wanita pada 6 (enam) Kabupaten se Nusa Tenggara Timur.
k. Penyelenggaraan Latihan Ketrampilan Wanita yang melibatkan sejumlah 375 orang wanita dalam rangka Bina Swadaya di Kabupaten-kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Sumba Barat dan Ngada.
l. Latihan Kepemimpinan Wanita pada berbagai jenjang, baik tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
m. Ikut membina Pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak yang diprakarsai oleh Dharma Wanita, dan sampai dengan tahun 1983 jumlah Taman Kanak-kanak yang dikelola oleh Dharma Wanita tingkat Propinsi sejumlah 4 (empat) dan pada tingkat Kabupaten sejumlah 37 buah.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program PKK di Nusa Tenggara Timur, berikut diuraikan secara terperinci.

Pelaksanaan Kegiatan PKK Pelita II

1. Pengumpulan Data

PKK di Nusa Tenggara Timur mulai dikenal sejak awal Pelita II, yaitu setelah PKK diangkat menjadi program nasional dalam kaitannya dengan pembangunan desa. Jauh sebelum itu, PKK hanya dikenal dalam kurikulum sekolah dengan kepanjangan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.

Sampai dengan 1976 kegiatan yang dilakukan baru pada tahap mencapai pola, yang kiranya dapat diterapkan di Nusa Tenggara Timur.

Pada periode tahun 1977, untuk lebih memantapkan pelaksanaan gerakan PKK, maka usaha yang ditempuh ialah dengan mengadakan pengumpulan data, antara lain:

- dengan jalan mengadakan kunjungan daerah;
- mengadakan pertemuan-pertemuan lintas sektoral di pihak pemerintah, maupun dengan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui masalah pokok yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, yang dapat dijadikan titik tolak untuk memulai gerakan ini, terutama dalam menetapkan strategi gerakan PKK masa kini dan masa yang akan datang.

Gerakan PKK, di Nusa Tenggara Timur baru dapat terlaksana dengan baik apabila infrastruktur sosial yang ada di desa benar-benar kuat. Artinya dia bisa berperan secara aktif dalam pembangunan di desa.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka strategi utama yang harus dilakukan antara lain adalah memantapkan infrastuktur sosial yang terlibat langsung dalam gerakan PKK, seperti:

- Pemantapan Pengurus/Tim Penggerak PKK di Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta Seksi PKK/LKMD di desa.
- Pemantapan Tim Pembina LKMD di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta LKMD di desa.
- Pertemuan-pertemuan lintas sektoral untuk menumbuhkan keterpaduan dalam rangka pembinaan PKK/LKMD.

Penetapan strategi tersebut semakin mantap setelah adanya dukungan moril dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980, tentang Penyempurnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 225 Tahun 1980, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD.
c. Instruksi Mendagri Nomor 10 tahun 1980, tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
d. Instruksi Mendagri No 30 Tahun 1981, tentang Pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK.

Family Welfare Promotion activities in East Nusa Tenggara can be carried out successfully on condition that social infrastructure in vilages has been strong enough, ie if it plays an active role in rural development.

Based on such consideration, the main strategy to be programmed is solidifying social infrastructure involved directly in Family Welfare Promotion activities, such as:

- *Organizers/Activating Team of Family Welfare Promotion in provincial, kabupaten and sub-district levels and Rural Community Resilience Institution in villages.*
- *Cross-sectoral meetings so as to create an integration in promoting Family Welfare Promotion/Rural Community Resilience Institution.*

The establishment of the above-mentioned strategy is firmer because of the moral supports stated below :

a. President's Decree No 28 of 1980 - concerning the Promotion of the function of Rural Social Institution to be Rural Community Resilience Institution.
b. Domestic Affairs Minister's Decree No 225 of 1980 - concerning the Organization Structure and Working System of Rural Community Resilience Institution.
c. Domestic Affairs Minister's Instruction No 10 of 1980 - concerning Family Welfare Promotion.
d. Domestic Affairs Minister's Instruction No 30 of 1981 - concerning the Formation of 'Rural Community Reselience Institution' Promoting Team and 'Family Welfare Promotion' Activating Team.
e. Domestic Affairs Minister's Instruction No 29 of 1981 - concerning the Realization of the Formation of 'Rural Community Resilience Institution' Promoting Team and 'Family Welfare Promotion' Activating Team.
f. Other regulations established by the Governor of East Nusa Tenggara.

2. Preliminary Activities

The preliminary activities making Family Welfare promotion more populer among East Nusa Tenggara people include.

a. 'Family Welfare Promotion' Work Meeting of the province of East Nusa Tenggara conducted in 1977.
b. 'Healthy and Prosperous Family' Crash Program conducted at the end of 1978.
c. Cross-Sectoral Coordination Meeting held in the provincial level, and then continued in kabupaten in 1979.
d. Leadership Training for 'Healthy and Prosperous Family' Integrated Programs in the provincial level in 1979.
e. Regional Meeting of 'Promotion of Women's Role for A Healthy and Prosperous Family' Integrated Programs held in 1980.

Family Welfare Promotion' Activities during the Five-Year Development II

In Rural Level

a. Information spreading and 'Family Welfare Promotion' popularizing were done by giving suggestions and instructions, especially to housewives. It concerned the significance, organization and realization of a 'Family Welfare Promotion' program and was conducted by way of visiting rural areas, either directly, via mass media or via any exhibition on 'Family Welfare Promotion' achievements.
b. Organization Solidification.
In order to strengthen 'Family Welfare Promotion' sections in villages in performing their duties and functions, in 1983/1984 a leadership training was held and followed by 5 people (each village). It was funded by Inpres-Aid for Rural Development of 1983/1984 and resulted in 8,600 members of 'Family Welfare Promotion' sections in 1,720 villages. These members were expected to be able to activate the performance of 10 Main Programs of Family Welfare Promotion.

Other activities significant for the organization solidification include :

- *Activities between 'Family Welfare Promotion' sections and work groups (both territorial and functional).*
- *Activities between 'Family Welfare Promotion' sections and other sections belonging to Rural Community Resilience Institution.*
- *Activities between 'Family Welfare Promotion' sections and 'Family Welfare Promotion' Activating Team.*

Such activities were conducted minimally twice a year in each village. The main subject was to discuss the planning of the utilization of Inpres-Aid for Rural Development shared to Family Welfare Promotion (making "DRUP PKK") and program the realization of 'Family Welfare Promotion' activities after the legalization of the "DRUP" by Bupati.

e. Instruksi Mendagri No 29 Tahun 1981, tentang pelaksanaan Pembentukan Tim Pembina LKMD dan Tim Penggerak PKK.
f. Berbagai peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

2. Kegiatan Awal

Sebagai kegiatan awal yang membawa PKK semakin dikenal di Nusa Tenggara Timur, antara lain:

a. Rapat Kerja PKK Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1977.
b. Crash Program "Keluarga Sehat Sejahtera", yang dilaksanakan pada akhir tahun 1978.
c. Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di tingkat Propinsi yang dilanjutkan dengan rapat semacam di Kabupaten tahun 1979.
d. Latihan Kepemimpinan Program Terpadu Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Propinsi tahun 1979.
e. Rapat Regional Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera tahun 1980.

Kegiatan PKK Pelita III

Di Tingkat Desa

a. Penyebarluasan informasi atau pemasyarakatan PKK melalui berbagai penyuluhan dengan sasaran utama kaum ibu. Penyuluhan tersebut menyangkut pengertian, kepengurusan dan Program PKK. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi desa-desa, baik secara langsung, melalui mass media maupun pameran hasil-hasil PKK.
b. Pemantapan Organisasi

Untuk memperkuat Seksi PKK di desa agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dalam tahun 1983/1984 diadakan latihan kepemimpinan yang pesertanya terdiri dari 5 (lima) orang tiap-tiap desa dengan dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1983/1984 yang

Cadets preparation was done as follows: the holding of 'Family Welfare Promotion' cadets training (resulted in 1,844 cadets); the holding of female cadets courses in health affairs (resulted in 1,740 cadets); the holding of cadets courses in nutrition affairs (resulted in 2,410 cadets); formation of such special cadets as family-planning cadets, social-economic cadets and cadets of society development trained in Solo.

---

disediakan untuk latihan. Ini berarti akan menghasilkan 8.600 anggota seksi PKK di 1.720 desa yang mampu menggerakkan terlaksananya 10 program pokok PKK.

Kegiatan lain yang cukup penting artinya bagi pemantapan organisasi ditempuh melalui kegiatan:

— Seksi PKK dengan kelompok kerja (pokja), baik pokja teritorial maupun pokja fungsional.
— Seksi PKK dengan seksi-seksi lainnya dalam LKMD.
— Seksi PKK dengan Tim Penggerak PKK di tingkat atasannya.

Kegiatan ini diadakan minimal dua kali se tahun pada tiap-tiap desa yakni untuk membicarakan perencanaan penggunaan Inpres bantuan pembangunan desa untuk PKK (menyusun DRUP PKK) dan membicarakan pelaksanaan kegiatan PKK setalah DRUP tersebut disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Di bidang kaderisasi, ditempuh cara sebagai berikut: mengadakan latihan kader-kader PKK yang menghasilkan kader sebanyak 1.844 orang; mengadakan kursus kader wanita di bidang kesehatan yang menghasilkan kader khusus kesehatan sebanyak 1.740 orang; mengadakan kursus kader gizi yang menghasilkan kader gizi sebanyak 2.410 orang; membentuk kader khusus lainnya antara lain kader KB, kader sosial ekonomi serta latihan pengembangan masyarakat di Solo, bagi desa-desa yang berprestasi tentang Juara Lomba PKK.

B A B / *CHAPTER III*

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

ECONOMIC DEVELOPMENT

DALAM Pelita I pertumbuhan ekonomi di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agak lambat, yaitu berkisar 3,53%. Jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 8,81% per tahun. Sementara dalam Pelita II dan III pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat cukup tinggi. Masing-masing dalam Pelita II sebesar 10,27% per tahun dan 9,81% per tahun dalam Pelita III. Ini berarti pertumbuhannya lebih tinggi dari pertumbuhan Nasional. Masing-masing dalam Pelita II setinggi 7,22% per tahun dan 6,10% per tahun dalam Pelita III. Bila dihitung sejak tahun 1969 hingga tahun 1984 rata-rata pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 8,07% per tahun. Berarti lebih tinggi dibandingkan Pertumbuhan Nasional yang hanya 7,07%.

Laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi NTT antara lain disebabkan cepatnya tingkat pertumbuhan sektor-sektor non-pertanian. Dalam periode tahun 1979 hingga tahun 1984 beberapa sektor non-pertanian menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Sektor pertambangan dan penggalian rata-rata 24,74% per tahun. Sektor listrik, gas dan air minum 30,51% per tahun. Sektor perdagangan 12,10% per tahun yang didominir oleh pertumbuhan perdagangan besar dan eceran. Sektor pengangkutan 19,27% per tahun. Kenaikan sektor ini disebabkan cepatnya pertumbuhan sub sektor pengangkutan darat. Sektor bank dan keuangan 32,37% per tahun. Dan sektor pemerintahan serta keamanan 13,49% per tahun.

Sesuai dengan pola struktur perekonomian Nusa Tenggara Timur setiap Kabupaten, umumnya sektor pertaniannya memegang peranan besar. Sumbangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di setiap Kabupaten hampir sebanding dengan luas wilayah Kabupaten. Kecuali di beberapa Kabupaten seperti di Kupang, Sikka dan Ende sumbangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) relatif lebih tinggi dibanding luas wilayahnya. Ini disebabkan berkembangnya sektor-sektor non pertanian. Terutama di kabupaten Kupang telah berkembang dengan pesat sektor perdagangan, industri, transportasi dan sektor non-pertanian lainnya. Sebaliknya di kabupaten Sumba Timur, sumbangan PDRB jauh lebih kecil dari pada luas wilayah. Ini disebabkan lahan tanah yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk menambah kepadatan penduduk.

Rata-rata pendapatan per kapita penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp195.522,- dalam tahun 1984. Ini menunjukkan secara rata-rata penduduk di wilayah ini belum makmur. Rata-rata pendapatan perkapita lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan Nasional rata-rata perkapita yaitu Rp471.846,- (tahun 1984)

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi di propinsi ini dalam tahun 1984 cukup tinggi, yaitu 6,98%, dibanding perkembangan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,83%.

Untuk PDRB Harga Berlaku sejak tahun 1975 sampai tahun 1984 telah berkembang rata-rata 22,80% per tahun atau selama tahun 1979 hingga tahun 1984 rata-rata sekitar 21,24%. Dalam tahun 1977, 1979, 1981, 1982, 1983 dan 1984 mengalami pertumbuhan agak rendah dibawah rata-rata. Sedangkan pertumbuhan di tahun 1984 cukup besar yaitu 22,3%.

1. Sektor Pertanian dan Irigasi

Pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pelita III diprioritaskan kepada pembangunan di bidang ekonomi, dengan titik berat di sektor pertanian menuju swasembada pangan, industri yang mengolah bahan mentah menjadi baku dan barang jadi serta menseimbangkan ekonomi secara Nasional. Dalam Pelita IV, Pemerintah Daerah menetapkan "Strategi Pemenuhan Keperluan Pokok" dengan lebih mempertajam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

Dari survei tentang penyebaran tenaga kerja dalam tahun 1983 yang bergerak di sektor pertanian menunjukkan, bahwa sektor itu merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja. Kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa 6,64%, Industri 3,92% dan perdagangan sebesar 2,59%. Sementara luas areal pertaniannya tercatat sekitar 2.668.960 Ha. Terdiri dari lahan persawahan 108.607 Ha dan lahan untuk usaha perkebunan seluas 109.257 Ha.

IN THE FIVE-YEAR Development I the growth of East Nusa Tenggara economy was very slow (only 3.53% annually) and far under that of national economy (8.81% annually). Nevertheless, in the Five-Year Developments II and III it increased drastically to be 10.27% and 9.81% respectively and so exceeded those of national economy which were 7.22% and 6.10% respectively. In the period of 1969 through 1984 the average economic growth in East Nusa Tenggara totalled 8.07% annually, while the national growth only 7.07%.

The speed-up of economic growth in East Nusa Tenggara was caused by the very rapid growth of non-agricultural sectors occuring in the period of 1979 to 1984. Mining and excavation sector reached the average of 24.74% annually; electricity, gas and drinking water sector 30.51%; commercial sector 12.10% (dominated by the growth of wholesale and retail trade); transportation 19.27% (due to the rapid growth of land transportation sub-sector); bank and financial sector 32.37%; and governmental and security sector 13.49%.

In accordance with the economic structure design of East Nusa Tenggara for each district, agricultural sector holds a substantial role. The contribution of each district in the form of Gross Regional Domestic Product has in majority been proportional to its territorial extent, except Kabupaten Kupang, Sikka and Ende which give relatively higher contributions compared to their territorial extents. This results from the well-running development of non-agricultural sectors, especially in Kabupaten Kupang. Here such sectors as trade, industry, transportation, etc grow rapidly. On the contrary, the Gross Regional Domestic Product of Kabupaten East Sumba is relatively low compared to its territorial extent. This is because of the fact that the existing land has not been utilized yet for population increase.

In East Nusa Tenggara the people's average income per capita reached the total of Rp195,522 for the year of 1984. This indicates that people living in this territory can not be categorized as prosperous yet. The proof is that for the same year, the national average income per capita amounted to Rp471,846 - Compare to that of East Nusa Tenggara.

Notwithstanding, the 1984 economic growth of this province was excellent enough (6.98%) compared to that nationally (5.83%).

In the period of 1975 through 1984 the Gross Regional Domestic Product on the Applied Price reached an annual average growth of 22.80% (from 1979 to 1984, it was 21.24%). In the years of 1977, 1979, 1981, 1982, 1983 dan 1984, the growth was slightly slow and under the average. In 1983, it was 22.3%.

1. Agriculture and Irrigation

During the Five-Year Development III the priority of East Nusa Tenggara development was given to the economy with the stress on agricultural sector. This was meant to create a condition in which food could be produced through self-efforts (by processing raw materials to be the prepared) and also to make a balance in economy nationally. In the Five-Year Development IV Regional Government establish "The Strategy for Principal Needs Implementation" and confirm the Trilogy of Development and the Eight Files of Equity.

A survey on the dispersal of agricultural manpower conducted in 1983 indicates that agriculture is the biggest sector in relation to manpower utilization. It is subsequently followed by such sectors as service (6.64%), industry (3.92%) and trade (2.59%). The extent of agricultural area is approximately 2,668,960 Ha, inclusive of farming land by 108,607 Ha and horticultural land by 109.257 Ha.

a. Sub-Sector of Foodstuff Plants

Increase in the production of rice, second-crops and horticulture in East Nusa Tenggara during the Five-Year Development III was chiefly due to the support of such programs as intensification, extension and diversification. Increase in rice production reached its highest point in the budgetary year of 1981/1982, ie commencing from the planting season of 1981 the time in which "Nusa Makmur Operation" was conducted in East Nusa Tenggara. On the contrary, the lowest rate of rice production occurred in 1979, totalling 109,164 tons (under the 1978 production by 31.4%). In 1981, the production was 159,152 tons ground dry brown rice.

In 1980, the extent of production crop in East Nusa Tenggara was 61,653 Ha with the production total of 151,434 tons (approximately 2.5 tons/Ha).

a. Sub-Sektor Tanaman Pangan

Peningkatan produksi padi, palawija dan holtikultura di Propinsi **Nusa Tenggara** Timur selama Pelita III terutama disebabkan karena **adanya dukungan** kuat dari program intensifikasi, disamping adanya **usaha pokok** lain seperti ekstensifikasi dan diversifikasi. Peningkatan **produksi padi** selama Pelita III (Tahun 1978—1982) mencapai puncaknya **di tahun anggaran** 1981/1982, yang dimulai pada musim tanam 1981. **Terutama** pada saat dimulainya "Gerakan Operasi Nusa Makmur **Daerah** Nusa Tenggara Timur". Sedang produksi padi terendah terjadi **pada** tahun 1979, yakni sebesar 109.164 ton, berada di bawah produksi **tahun** 1978 sebesar 31,4% (produksi tahun 1981 sebesar 159.152 ton gabah kering giling).

Luas panen produksi pada sawah di Nusa Tenggara Timur tahun 1980 mencapai 61.653 Ha dengan jumlah produksi 151.434 ton (rata-rata 2,5 ton/Ha). Kemudian mengalami peningkatan dalam tahun 1982 menjadi 86.240 Ha dengan jumlah produksi 316.330 ton (rata-rata 3,7 ton/Ha).

Tiga kabupaten tergolong cukup luas tanah sawahnya yakni Kupang, Sumba Barat dan Manggarai. Laju kenaikan produksi per hektar yang tertinggi terjadi di Kabupaten Manggarai. Dalam tahun 1980 rata-rata 2,3 ton/ha, sedang di tahun 1982 berkembang menjadi 4,3 ton/ha (lebih dari 50% kenaikannya). Di lihat dari luas areal tanah sawah dan luas panen, umumnya luas panen dari setiap kabupaten belum mencapai luas areal tanah sawah. Kecuali di Kabupaten Manggarai yang mempunyai luas tanah 12.253 ha namun berhasil mencapai luas panen 37.583 ha atau terjadi kenaikan 25.330 ha (207% dari luas tanah sawah).

Untuk perkembangan produksi pangan beras di Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir memang agak menurun dibandingkan pada tahun-tahun akhir Pelita III. Akan tetapi keadaan tersebut dapat disubstitusi oleh produksi jagung dan ubi-ubian yang meningkat. Rata-rata produksi beras selama Pelita IV hanya sebesar 250.000 ton per tahun (akhir Pelita III 350.000 ton per tahun), sedangkan produksi jagung sebesar 270.000 ton per tahun (akhir Pelita III : 215.000 ton per tahun), dan produksi ubi-ubian sebesar 860 ton per tahun (akhir Pelita III : 580.000 ton per tahun)

Selain itu produksi kacang-kacangan semakin meningkat. Produksi kacang tanah rata-rata per tahun selama Pelita IV sebesar 10.500 ton, kacang hijau 14.500 ton dan kedelai 400 ton dibanding akhir Pelita III masing-masing sebesar 7.500 ton, 17.500 ton dan 300 ton.

Namun demikian secara umum dapat dikatakan, perkembangan produksi beberapa komoditi tanaman padi palawija di daerah Nusa Tenggara Timur selama Pelita I, II dan III dinyatakan dalam prosentase (%) justru cenderung meningkat. Sebagai contoh, untuk komoditi padi sawah dalam Pelita I (12,8) naik menjadi 13,9 (Pelita II) dan meningkat lagi menjadi 24,5 (dalam Pelita III). Kemudian untuk ubi kayu dari 2,1 (Pelita I) naik menjadi 7,3 (Pelita II) dan meningkat lagi menjadi 11,6 (dalam Pelita III). Sedang untuk kedele dari 9,4 (Pelita I) meningkat menjadi 23,5 (Pelita II) dan meningkat secara drastis menjadi 87,05 (dalam Pelita III) Lihat Tabel III — 1.

b. Sub sektor Perikanan

Potensi perikanan di Propinsi Nusa Tenggara Timur cukup besar, baik perikanan laut maupun darat. Dalam Pelita III potensi perikanan di daerah ini mencapai luas areal 19.955.392 ha dengan produksi maksimal 201.940 ton. Produksi ikan yang bersumber dari usaha perikanan rakyat di tahun 1982 mencapai 38.305 ton, atau 89,50% dari target yang ditentukan sebesar 42.800 ton. Walaupun target tersebut belum tercapai, namun laju pertumbuhan sudah mencapai 8,96% per tahun selama 1979 - 1982. Ini berarti 0,90% lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan produksi tahunan selama Pelita II sebesar 8,06% per tahun.

Produksi perikanan dalam tahun 1983 sebesar 47.224 ton, tahun 1984 sebesar 43.422,2 ton dan dalam tahun 1985 sebesar 45.568,0 ton. Lihat Tabel III — 2

Selama tahun 1983 hingga 1985 produksi perikanan rakyat cenderung meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,5% per tahun. Sedangkan tingkat produksi perusahaan perikanan dalam mengeksploitir perairan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) cenderung menurun. Bahkan hingga tahun 1985 ternyata perusahaan perikanan yang mengeksploitir perairan ZEE tidak aktif dalam melaksanakan kegiatan penangkapan.

Di pihak lain khusus menyangkut produksi perikanan darat, terlihat mengalami penurunan dan kenaikan yang sangat bervariasi. Hal ini disebabkan sistem pengusahaannya disinyalir masih kurang intensif serta pola pengusahaannya masih bersifat usaha sambilan.

Dengan produksi perikanan pada tahun 1985 sebesar 45.568,0 ton, berarti tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun penduduk Nusa Tenggara Timur baru mencapai rata-rata 13,4 kg atau 74,4% dari

In 1982, it increased to be 86,240 Ha with the production total of 316,330 tons (3.7 tons/Ha).

Three kabupaten categorized having sufficiently wide farming land include Kupang, West Sumba and Manggarai. The highest increase in production per hectare took place in Manggarai.In 1980, this area reached the average production of 2.3 tons/Ha, while in 1982 4.3 tons/Ha - there was an increase of more than 50% in the duration of two years. In general, the extent of crop in each kabupaten has not been proportional yet to the extent of farming land, except Kabupaten Manggarai. It had farming land by 12,583 Ha but succeeded in reaching the crop extent of 37,583 Ha. Thus, there was an increase of 25,330 Ha (207% of the extent of farming land).

In the recent three years, the growth of rice production in East Nusa Tenggara has indicated a slight decrease compared to that in the last years of Five Year Development III. Such a circumstance, however, could be covered with the increase in corn and tuber production. During the Five-Year Development IV the annual average production of rice was only 250,000 tons (at the end of Five-Year Development III it was 350,000 tons), while that of corn 270,000 tons (at the end of Five-Year Development III it was 215,000 tons) and that of tuber 580,000 tons).

The production of beans also recorded an increase.During the Five-Year Development IV the annual average production of groundnut was 10,500 tons, while that of small green pea 14,500 tons and that of soybean 400 tons - at the end Five-Year Development III it was 7,500 tons, 17,500 tons and 300 tons respectively.

On the whole it is concluded that during the Five-Year Developments I, II and III the production of rice and second crops in East Nusa Tenggara tended to be in a percentage upwards. For examples, rice of irrigated land was 12.8 (Five-Year Development I), then 13.9 (Five-Year Development II) and 24.5 Five-Year Development III); cassava was 2.1 (Five-Year Development I), then 7.3 (Five-Year Development il) and 11.6 (Five-Year Development III); soybean was 9.4 (Five-Year Development I), then 23.5 (Five-year Development II) and drasticaly became 87,05 (Five-Year Devlopment III). See Table III-1.

Tabel / *Table III — 1*

PRODUKSI PANGAN DI NUSA TENGGARA TIMUR
FOODSTUFF PRODUCTION IN EAST NUSA TENGGARA

No Komoditi *Commodity*	Pelita I *Five-Year-Development I*	Pelita II *Five-Year-Development II*	Pelita III*) *Five-Year Development III*	Keterangan *Remarks*
1. Padi Sawah/ *irrigated land paddy*	12,8	13,9	24,5	
2. Padi Ladang/10,6 *Arid land paddy*	10,6	8,4	5,5	
3. Jagung/*Maize*	0,8	2,7	13,0	
4. Ubi Kayu/*Cassava*	2,1	7,3	11,6	
5. Ubi Jalar/*Sweet*	2,9	8,7	9,5	
6. Kacang Hijau/*Small green peas*	26,2	2,0	30,9	
7. Kacang Tanah/*Peanuts*	9,1	21,9	21,0	
8 K e d e l e /*Soybean*	9,4	23,5	87,05	

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Source : Foodstuff Agricultural Office of East Nusa Tenggara Province.
Keterangan : *) Pelita III tahun 1978 - 1982.
Note : *) Five-Year Development III, the Years of 1978 through 1982.

b. Sub-Sector of Fishery

The potency of fishery in East Nusa Tenggara, both sea and island, is great enough. In the Five-Year Development III it reached and area of 19,955,392 Ha with the maximal production of 201,940 tons. In 1982, the production resulting from smallholders's fishery undertaking totalled 38,305 tons or 89.50% of the established target (42.800 tons). Even though this target was not accessible yet, the rate of annual growth reached 8.96% in the period of 1979 through 1982. This means that it was 0.90% higher than that in the Five-Year Development II (which was 8.06%).

Fishery production in the years of 1983, 1984 and 1985 was 47,224 tons, 43,422.2 tons and 45.568 resectiacely. See Table III - 2.

From 1983 to 1985, the production of smallholders' fishery tended to have an increase annually (by the average of 4.5%). On the contrary, the fishery company exploiting the waters of Exclusive Economic Zone tended to have a decreasing production. Even, up to 1985 it was not active in fish catching.

In the case of inland fishery production there was a considerable variation in both increase and decrease. This was due to the undertaking system which was not sufficiently intensive yet and which had the characteristic as side-undertaking.

Tabel / *Table III — 2*

PRODUKSI PERIKANAN 1983 — 1985
FISHERY PRODUCTION, 1983 — 1985

Sektor / *Sector*	Produksi / *Production* 1983	1984	1985	*) Kenaikan rata-rata/tahun (%) / *Annual Average Increase (%)*
Perikanan Rakyat/ *Smallholders' Fishery*	41.488,6	42.506,1	45.334,0	4,5
Perusahaan Perikanan (Peraian ZEE)/ *Fishery companies (Exclusive Economic Zone)*	5.501,0	736,2	—	63,4
Perikanan Darat/ *Inland Fishery*	234,4	179,9	234,0	0,08

Keterangan *) · Angka Sementara / *) *Temporary Figures*

kebutuhan baku konsumsi ikan, secara Nasional sebesar 18 kg per kapita per tahun.

Dalam Repelita IV orientasi pembangunan perikanan masih diarahkan pada upaya memacu kenaikan produksi. Dalam Pelita III sejumlah proyek sudah dilaksanakan. Meliputi proyek peningkatan produksi perikanan, pembinaan dan pengembangan aneka ikan, dan Proyek Rehabilitasi Pertanian Tanaman Pangan Daerah Rawan (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga Berencana).

Jumlah biaya untuk proyek-proyek tersebut sebesar Rp613.725.000,- dan proyek-proyek ini merupakan proyek sektoral. Disamping proyek-proyek itu masih ada sejumlah proyek yang diperuntukkan bagi : (1) Proyek Pembukaan Jalan ke dermaga perikanan Alor, (2) Proyek bantuan peralatan untuk nelayan, (3) Proyek rehabilitasi air payau, (4) Proyek pembangunan Balai Latihan dan Ketrampilan Nelayan lepas pantai, (5) Proyek bantuan peralatan penangkapan ikan bagi nelayan di daerah rawan dan terpencil. (6) Proyek penelitian potensi udang, (7) Proyek pembinaan dan pengembangan aneka ikan, (8) Proyek rehabilitasi pertanian tanaman pangan daerah rawan, (9) Proyek percobaan pembuatan tambak garam dan ikan, (10) Proyek peningkatan sarana produksi budidaya ikan, (11) Proyek laboratorium pengujian mutu hasil perikanan, dan (12) Proyek pengembangan administrasi pembangunan perikanan. Secara keseluruhan proyek-proyek tersebut menelan biaya sebesar Rp249.897.000,- (1979 - 1982).

Produksi ikan yang bersumber dari usaha perikanan rakyat pada tahun 1982 mencapai 38.305 ton. Ini berarti 89,50% dari target yang ditentukan sebesar Rp42.800 ton, Lihat Tabel III — 3.

In 1985, fish production was 45,568 tons, meaning that the rate of annual fish consumption of East Nusa Tenggara people per capita reached the average of 13.4 Kg. Thus, it was 74.4% of the national standard fish consumption (18 Kg per capita annually).

In the Five-Year Development IV fishery development is still oriented to the ways of how to speed up production increase. In the Five-Year Development III several projects had been implemented. These projects include project for fishery production in crease, project for the promotion and development of various kinds of fish and project for the rehabilitation of foodstuff agriculture in anxious area.

The abovementioned projects were sectoral projects and costed Rp613,725,000. Besides, there were still a number of projects as follows: 1) Project for the opening of the way to Alor fishery pier, 2) Project for fishing-tackle aid for fishermen, 3) Project for the rehabilitation of brackish water, 4) Project for the construction of training and skill centre for off-shore fishermen, 5) Project for fishing-tackle aid for fishermen in anxious and remote areas, 6) Project for the research into shrimp potency, 7) Project for the promotion and development of various kinds of fish, 8) Project for the rehabilitation of foodstuff agriculture in anxious area, 9) Project for the trial of the making of fish and salty water-pond, 10) Project for the enhancement of fish undertaking production facilities, 11) Project for the testing laboratory of fish production quality, and 12) Project for the intensification of fishery development administration. All these projects costed Rp249,897,000 (1979-1982).

Fish production deriving from smallholders' fishery undertaking of 1982 totalled 38,305 tons, meaning that it was 89,50% of the established target (42,800 tons). See Table III - 3

Tabel / *Table III — 3*

PERKEMBANGAN PRODUKSI IKAN SEKTOR PERIKANAN RAKYAT DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1974 - 1982 (Satuan ton)
THE GROWTH OF FISH PRODUCTION OF SMALLHOLDERS' FISHERY IN EAST NUSA TENGGARA 1974 - 1982 (in tons)

Tahun / *Year*	Laut / *Sea*	Perairan Umum / *General Waters*	Tambak / *Brackish Pond*	Kolam / *Pool*	Sawah / *Rice-Field*	Jumlah / *Total*
1974	20.691	168		23	10	20.912
1975	22.611	120	22	25	9	22.787
1976	24.482	139	25	81	24	24.751
1977	26.859	100	24	26	15	27.024
1978	28.280	147	24	28	25	28.504
1979	29.380	145	27	40	48	29.640
1980	31.195	132	21	42	45	31.435
1981	35.256	148	22	43	41	35,510
1982	38.035	151	24	45	50	38.305
Kenaikan tahunan 1974-1978 (%) / *Annual Increase, 1974-1982 (%)*	8,14	1,40	3,21	5,09	29,45	8,06
Kenaikan tahun 1979-1982 (%) / *Annual Increase, 1979-1982 (%)*	9,03	1,73	1,03	3,72	14,70	8,96
Kenaikan tahunan 1974-1982 (%) / *Annual Increase, 1974-1982 (%)*	8,59	1,57	2,12	9,41	22,08	8,51

Baik komposisi maupun proporsi produksi ikan di daerah ini didominasi oleh hasil penangkapan ikan laut. Kenyataan demikian mempunyai arti penting bagi peletakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah sebagai upaya meningkatkan penggalian sumber ikan laut bagi tulang punggung perekonomian Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Angka-angka di bawah ini menunjukkan tingkat produksi, misalnya pada tahun 1980 jumlah tangkapan mencapai 11.488.000 ekor, kemu-

The composition and proportion of fish production in this province are dominated by the result of sea-fish catching. Such a fact signifies that sea fishery is so necessary that Regional Government should find a way of how to make increase in production, for it can be used as the economic backbone of East Nusa Tenggara Province.

The following figures show the rate of production in fish catching: in 1980, totalling 11,488,000 fishes; in 1981, becoming 15,005,300 fishes; and in 1982 (up to June), still totalling 1,995,250 fishes with the tendency that in this year the result of catching would exced those in the previous years.

Fish production in the Five-Year Development III had an annual average increase of 8.96%. This resulted from various efforts and activites supporting factors as education and guidance.

In carrying out the program for cheap fish undertaking, 79,780 fish-germs have been spread in some areas specified as follows :

- *Kupang* : 29,300
- *Southern Central Timor* : 4,700
- *Manggarai* : 8,500
- *West Sumba* : 21,500
- *East Sumba* : 15,730

Rangkaian kunjungan kerja Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto ke Propinsi Nusa Tenggara Timur pada dasarnya merupakan kegiatan yang besar manfaatnya bagi upaya untuk memberikan motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada bagian lain, Presiden juga mendapat masukan yang berarti mengenai berbagai kendala maupun hambatan yang muncul di lapangan.

Coverage on an official visit by President Soeharto and Madame Tien Soeharto to the Province of East Nusa Tenggara. Such a visit is principally useful to motivate the people's participation in the development. At the same time the President also obtains significant feedback concerning the handicap found in the field.

















Rangkaian peristiwa kegiatan panen raya di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan tersebut Presiden Soeharto bersama Ibu Tien Soeharto terjun ke sawah turut memanen. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengadakan dialog dengan para petani.

A series of events on great harvest in Manggarai District, East Nusa Tenggara. President Soeharto and Madame Tien Soeharto joined the farmers to harvest rice while taking the opportunity to talk with the farmers.









Sapi Brangus Bantuan Presiden ini mampu mendorong peternak sapi untuk terus mengembangkannya. Foto lainnya ialah lahan pertanian pangan yang cukup memenuhi harapan petani padi.

Muzzled cows, the aid given by the President, are capable of encouraging cattle breedees to continuously promote breeding of these cows. Other pictures illustrate the agricultural land of food crops, adequate to realize the hope of farmers.









Potensi dan dukungan sektor Pekerjaan Umum terhadap keberhasilan pembangunan di NTT cukup besar manfaatnya. Terutama daya serapnya terhadap sektor ketenagakerjaan. Nampak ujud nyata yang telah dihasilkan oleh Departemen Pekerjaan Umum untuk kepentingan pembangunan daerah.

The potential and contribution given by the sector of Public Work to make the development in East Nusa Tenggara a success are considerably useful, especially in view of its capacity to absorp manpower. Pictures show the gains obtained through the programmes organized by the Ministry of Public Work to serve the regional development.









Berbicara pembangunan sektor kesehatan, NTT memiliki RS. Umum Daerah Waikabubak, RS. Kristen Lindimara, RSUD dan tenaga medis maupun paramedis yang cukup memadai seperti nampak pada gambar. Gambar lain adalah salah satu kegiatan penimbangan bayi.

The development in health sector has provided the Province of East Nusa Tenggara with adequate health facilities such as General Hospital of Waikabubak Region, Christian Hospital of Lindiwara, Regional General Hospital and medical staff as well as paramedics as shown on the pictures.













Melalui berbagai usaha yang cukup serius, akhirnya pola tanam dan sistem pertanian yang efektif bisa diterapkan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan konsepsi demikian, bumi cendana kini bisa lebih dapat dikembangkan sebagai areal pertanian yang patut dibanggakan. Tebu dan kelapa maupun tanaman holtikultura lainnya misalnya, hasilnya dapat kita lihat di halaman ini.

Through different kinds of serious efforts, finally the planting pattern and effective agricultural system can be implemented in the Province of East Nusa Tenggara. Using these concepts, the Province, popularly known as "Cendana" (sandal-wood) land, can be promoted as an agricultural area that can be proud of. Sugar cane and coconuts as well as other horticultural cultivations, for instance, give satisfying result as depicted on this page.



dian pada tahun 1981 naik menjadi 15.005.300 ekor. **Pada tahun** 1982 **(sampai dengan** Juni) jumlah tangkapan baru tercatat 1.995.250 ekor **dengan kecenderungan** pada tahun tersebut hasilnya akan melebihi **tahun-tahun** sebelumnya.

Produksi ikan Pelita III meningkat rata-rata 8,96% per tahun. Ini **dimungkinkan** karena berbagai usaha dan kegiatan telah dilaksanakan **secara** terpadu dan intensif disamping tersedianya faktor penunjang **lainnya** seperti program pendidikan dan penyuluhan.

Dalam rangka program pengadaan ikan murah telah disebarkan **79.780 ekor** benih ikan dengan perincian sebagai berikut:

- Kupang	:	29.300 ekor
- Timor Tengah Selatan	:	4.700 ekor
- Manggarai	:	8.500 ekor
- Sumba Barat	:	21.500 ekor
- Sumba Timur	:	15.730 ekor

Program pengadaan ikan murah tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi kegiatan di sub sektor perikanan. Dengan demikian usaha ini telah memberikan manfaat secara langsung pada para petani ikan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Repelita IV, diharapkan produksi ikan akan meningkat dari 5.000 ton pada tahun 1984 menjadi 85.000 ton pada tahun 1988 dengan tingkat kenaikan sebesar 11,33% per tahun.

c.Sub sektor Kehutanan

Sasaran pembangunan bidang kehutanan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pelita IV masih tetap ditekankan pada pengembangan kegiatan-kegiatan utama, meliputi pengusahaan hutan, inventarisasi pengukuhan hutan, rehabilitasi kawasan hutan. Disamping peningkatan aparatur dan prasarana kedinasan di tingkat Kabupaten.

Sasaran kegiatan utama terdiri dari pemulihan tanah kritis, inventarisasi dan pengukuhan hutan dan pengembangan hutan produksi. Pemulihan tanah kritis terdiri dari penghijauan. Dalam tahun 1987/1988 kegiatan penghijauan dengan target rata-rata 29.500 ha. Baik melalui program Inpres penghijauan maupun Social Forestry. Untuk reboisasi ditargetkan seluas 10.000 - 11.000 Ha. Terutama melalui kegiatan Inpres Reboisasi. Sehingga pada akhir Pelita IV tercapai penurunan lahan kritis sebesar 9 — 10%.

Seperti diketahui, potensi hutan propinsi Nusa Tenggara Timur relatif diketahui. Luas kawasan hutan keseluruhan sekitar 1.252.511 Ha atau 26,43% dari luas wilayah. Terdiri dari hutan lindung 1.079.715 Ha, hutan produksi 113.787 Ha, hutan suaka alam 45.099 Ha dan hutan wisata 16.000 Ha. Lihat Tabel III — 4.

Lahan hutan Negara yang tergolong cukup luas di Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Manggarai dan Sumba Barat antara 106.007 Ha sampai dengan 80.640 Ha. Yang tergolong sedang di Kabupaten Ngada, Flores Timur dan Timor Tengah Selatan antara 44.990 sampai dengan 39.468 Ha. Sedangkan yang kecil di Kabupaten Belu, Alor, Ende, Sikka dan Timor Tengah Utara, antara 24.854 sampai dengan 11.443 Ha.

Dalam rangka program Pelestarian Hutan, tanah dan air, maka dalam tahun 1982 diadakan reboisasi lahan kritis dan peremajaan tanaman hutan seluas 13.325 Ha dengan 13 macam jenis tanaman.

Jenis tanaman yang dipilih untuk reboisasi dilihat dari prosentase areal penanaman adalah sebagai berikut: jati 28,44%, Ampupu dan Kemiri masing-masing 16%, Akasia 13%, johar 9% dan ke—8 jenis lainnya 9% sampai dengan 1% (Mahoni, Kaliandra, Cemara, Lamtoro gung, Saga, Aelizza, Asam dan Kayu Manis).

Produksi hasil hutan Nusa Tenggara Timur 1979/1980 yang cukup menonjol adalah Asam 4.956 ton dan Kemiri 1.480 ton. Tahun 1980/1981 produksi kemiri meningkat 3.081 ton dan kemudian berkurang menjadi 1.338 ton tahun 1982/1983. Asam mengalami penurunan drastis sejak tahun 1979/1980 sehingga pada tahun 1982/1983 tinggal 1.128 ton. Produksi kayu rimba persegi pada tahun 1982/1983 3.379 meter^3 dan kayu rimba kasar 650 meter^3.

Luas tanah kritis di luar kawasan hutan mencapai ± 2.000.000 Ha. Untuk mengatasi tanah kritis tersebut pemerintah Daerah mengadakan kegiatan reboisasi dan penghijauan. Kegiatan reboisasi sebelum Pelita mencapai 4.310,42 Ha. Kemudian dalam Pelita I, 3.414,15 Ha, Pelita II, 13.342,15 Ha, dan Pelita III mencapai 39.835 Ha. Dilihat dari tingkat penyebaran hutan menurut jenisnya hanya terdapat sekitar 26,43% dari keseluruhan wilayah. Sedangkan selebihnya merupakan hutan primer dan hutan sekunder.

Untuk memperoleh kepastian hukum atas status dan batas kawasan hutan, pemerintah melalui Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara Timur mengadakan pengukuhan hutan. Tujuannya adalah untuk memantapkan prasarana bagi kegiatan perencanaan dan pengelolaan hutan sehingga dapat tercapai fungsi optimal dari kawasan

Such a program is expected to arouse a motivationin fishery activities and give direct benefit to fish farmers in particular and the public in general.

It is expected.that in the Five-Year Development Plan IV fish production will enhance from 5,000 tons (1984) to 85,000 tons (1988) with an annual increase of 11.33%.

c. Sub-Sector of Forestry

The target of forestry development in East Nusa Tenggara in the Five-Year Development IV is still emphasized on the intensification of main activities, which include forestry undertaking, inventory and forest confirmation, rehabilitation of forest area and enhancement of officers and infrastructure in kabupaten.

The target of the main activities consists of the rehabilitation of critical soils, inventory and forest confirmation, and the development of productive forests. The rehabilitation here means the process of regreening. In 1987/1988, regreening activities are aimed at the average target of 29,500 Ha, both through Inpres-Program for Regreening and Social Forestry. Reafforestation has the target of 10,000 — 11,000 Ha, chiefly through Inpres-Program for Reafforestation, and his expected to have a decrease in critical soils by 9-10% at the end of Five-Year Development IV.

It is realized that the potency of forestry in East Nusa Tenggara is relatively small. Its entire extent totals approximately 1,252,511 Ha or 26.43% of the whole territory and consists of protected forest by 1,079,715 Ha, productive forest by 113,787 Ha, natural preserved forest by 45,099 Ha and tourism forest by 16,000 Ha. See Table III - 4.

Tabel / ***Table III — 4***

LUAS HUTAN DI NUSA TENGGARA TIMUR PULAU DAN JENIS HUTAN 1982 (HEKTAR)

THE EXTENT OF FOREST IN EAST NUSA TENGGARA BY ISLAND AND THE KIND OF FOREST 1982 (IN HECTARES)

Pulau *Island*	Hutan Lindung *Protected Forest*	Hutan Produksi *Productive Forest Forest*	Hutan Swaka Alam *Natural Preserved Forest*	Hutan Wisata *Tourism Forest*	Jumlah *Total*
01. Sumba	228.121	7.850	—	—	235.971
02. Sabu	149	—	—	—	149
03. Roto	9.403	—	—	—	9.403
04. Somau	—	1.790	—	—	1.790
05. Alor + Pantar	100.396	—	—	—	100.396
06. Timor	434.662	57.790	4.280	11.000	507.732
07. Flores	304.984	46.357	40.729	5.000	397.070
Jumlah / Total	1.077.715	113.787	45.009	16.000	1.252.511

State forest land having a sufficiently wide area exists in the districts of East Sumba, Kupang, Manggarai and West Sumba, ie ranging from 106,007 Ha to 80,640 Ha; while that having a moderate area in the Districts of Ngada, East Flores and Southern Central Timor (ranging from 44,990 to 39,468 Ha); and that having a small area in the Districts of Belu, Alor, Ende, Sikka and Northern Central timor (ranging from 24,854 to 11,443 Ha.

In implementing the program for the preservation of forest, soils and water, in 1982 such activities as reafforestation of critical land and forest replanting by 13,325 Ha with 13 sorts of plants were conducted.

The sorts of plants selected for reafforestation have the following percentage of planting area; teak 28.44%, ampupu and candlenut 16% for each, akasia 13%, johar 9% and the other 8 sorts (mahogany, kaliandra, fir, lamtoro gung, saga, aelizza, tamarind and cinnamon) 9% to 1%.

the sufficiently notable forest productions of East Nusa Tenggara in 1979/1980 were tamarind (4,956 tons) and candlenut (1,480 tons(. In 1980/1981, the production of candlenut increased to be 3,081 tons and then in 1982/1983 decreased to be 1,338 tons. Tamarind underwent a drastic decrease since 1979/1980 and so in 1982/1983 only totalled 1,128 tons. The production of square firewood in 1982/1983 was 3,379 m^3 and that of rough firewood 650 m.

The extent of critical land outside forest area reaches the approximate total of 2,000,000 Ha. So as to overcome such a land, Regional Government activate reafforestation and regreening programs. Prior to Five-Year Development I 3,414.15 Ha, in the Five-Year Development II 13,342.15 Ha and in the Five-Year Development III 39,835 Ha. Seen from the spread of forest by its kind, there is only 26.43% of the whole territory, more or less, while the rest are in the forms of primary and secondary forests.

In order to gain legal certainty about the status and limit of forest area, Government (represented by Planning Board of Forestry IV) of East Nusa

hutan.

Mengingat luas hutan yang relatif kecil, belum memenuhi syarat minimal luas kawasan hutan maka pemerintah berusaha mencapai luas kawasan yang optimal. Oleh sebab itu, sesuai dengan Surat Menteri Pertanian No 185/Mentan/III/1980 dan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Bap 023.I/186/80 tanggal 9 Juni 1980, disusunlah Rencana Tata Guna Hutan. Kesepakatan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ditetapkan kawasan hutan seluas 1.667.962 Ha atau 35,19% dari areal daratan Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari Hutan Lindung 677.962 Ha, Hutan Produksi 858.471 Ha, Hutan Suaka Alam 116.511 Ha dan Hutan Wisata seluas 15.379 Ha. Sampai tahun 1982 telah dikukuhkan kawasan hutan seluas 740.009,95 Ha atau 44,37% dari kawasan hutan yang direncanakan. Lihat Tabel III — 5.

Selanjutnya pada Pelita IV, dengan pertimbangan telah tersedianya tenaga pelaksana, direncanakan pengukuhan kawasan hutan sepanjang 1.115 Km.

Propinsi ini merupakan penghasil Cendana terbesar di Indonesia. Kayu ini merupakan bahan penghasil minyak cendana, kipas dan patung.

Daerah penghasil utama kayu cendana adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Kupang. Perhitungan produksinya didasarkan pada AAC (Annual Allowble Cut).

Dalam Pelita I produksi kayu cendana mencapai 3.517.295 Kh, Pelita II menurun menjadi 2.235.658 Kg. Sedangkan dalam Pelita III mencapai tingkat terendah yakni 1.732.782 Kg. Menurunnya hasil produksi kayu cendana pada Pelita II antara lain adanya kebijaksanaan pembatasan ekspor kayu ke luar negeri. Menurut ketentuan ekspor kayu (gelondongan) hanya 40%, sedangkan yang 60% harus diolah di dalam negeri.

Dari hasil inventarisasi terakhir terhadap pohon cendana yang ada, maka jumlah produksinya sekitar 750 ton per tahun. Realisasi produksi rata-rata setahun sejak tahun 1978 sampai 1982 ± 515 ton per tahun. Lihat Tabel III — 6.

d. Sub sektor Perkebunan

Potensi lahan perkebunan lebih kurang 50% dari luas tanah pertanian (± 645.000 Ha). Sedang tanaman perkebunan yang sudah merupakan komoditi sosial dan berperanan baik bagi sumber pendapatan petani daerah sebagai komoditi ekspor atau perdagangan antarpulau, adalah kopi dan kelapa (kopra).

Pengembangan budidaya Perkebunan di Nusa Tenggara Timur selama periode 1978 - 1982 melalui usaha-usaha pengembangan tanaman umur panjang (tanaman tahunan/tanaman keras). Disamping pengembangan tanaman semusim (umur pendek). Tanaman umur panjang terdiri dari: kelapa, kopi, coklat, cengkeh, jambu mete, vanili, kemiri dan lamtoro gung. Untuk tanaman umur pendek hanya terbatas pada pengembangan kapas, sedangkan tebu belum ada pengembangannya.

Karena itu peranan pengembangan tanaman perkebunan umur panjang (tanaman keras) di propinsi Nusa Tenggara Timur sangat penting artinya. Karena bermanfaat ganda, yaitu memberikan produksi yang membawa keuntungan ekonomi di satu pihak dan membawa keuntungan ekologis. Berdasarkan hal itu Pemda Nusa Tenggara Timur menetapkan di tahun 1978 sebuah Perda (Peraturan Daerah) yang mewajibkan rakyat menggalakkan penanaman tanaman keras.

Pengembangan budidaya ini dilakukan melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan tanaman perkebunan. Dengan didukung berbagai sumber pembiayaan, baik proyek pusat maupun proyek daerah. Karena jumlah tanaman muda jauh lebih besar dari tingkat produktivitas, produksi tanaman perkebunan belumlah sebanding dengan pertumbuhan luas areal. Berikut dapat dilihat perkembangan produksi tanaman perkebunan selama tahun 1979 - 1982. Lihat Tabel III — 7

Perkembangan realisasi antarpulau beberapa komoditi perkebunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 1981 hingga tahun 1984 menunjukkan angka peningkatan. Untuk komoditi kopra dalam tahun 1981 sebanyak 12.568,4 ton, meningkat dalam tahun 1982 menjadi 16.465,9 ton. Kemudian dalam tahun 1983 menjadi 17.613,2 ton, sementara dalam tahun 1984 sebesar 12.624,8 ton. Secara keseluruhan untuk 12 komoditi perkebunan dalam tahun 1981 sebesar 22.642,1 ton, tahun 1982 sebesar 26.606,8 ton, dalam tahun 1983 menjadi sebesar 29.891,2 ton sementara dalam tahun 1984 sebesar 21.220,0 ton. Tabel III — 8.

Untuk menciptakan suatu cara guna mengembangkan produksi di sub sektor perkebunan, pemerintah Daerah berusaha untuk mengembangkan budidaya tanaman kapas.

Dalam tahun 1964 - 1970 dilakukan usaha-usaha pengembangan kapas melalui PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) Serat, di Flores

Tenggara make forest confirmation. The aims is to consolidate the infrastructure of forest planning and undertaking so that the optimal function of forest area can be gained.

Owing to the relatively small extent of forest in East Nusa Tenggara, Government make efforts of reaching an optimal area extent. For this purpose, Plan of Forest Use Design has, under Agriculture Minister's Letter No 185/AM/III/1980 and East Nusa Tenggara Governor's Decision Letter No Bap 023.1/186/80 of June 9, 1980, been made. it is then established that forest area in this province should be 1,667,962 Ha or 35.19% of the land area, consisting of Protected Forest by 677,962 Ha, Productive Forest by 858,471 Ha, Natural Preserved Forest by 116,511 Ha and Tourism Forest by 15,379 Ha. Up to 1981, forest area confirmation totalled 740,009.95 Ha or 44.37% of the planned forest area. See Table III - 5.

Tabel / *Table III — 5*

KEMAJUAN PENGUKURAN HUTAN DI WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN anggaran 1981/1982
REALIZATION OF FOREST CONFIRMATION IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE UP TO THE BUDGETARY YEAR OF 1981/1982

No Pulau / *Island*	Luas Wilayah / *Territorial Extent*	Rencana kawasan hutan * / *The Planned Forest Area*		Kemajuan Pengukuhan Hutan / *Realization Confirmation*	
		Ha	% (4/3)	Ha	% (6/4)
1. Pulau/*Island* Sumba	1.105.240	342.931	31,03	147.074,38	42,89
2. Pulau Timor dan Sekitarnya/*Timor and its surroundings*	1.926.550	703.614	36,52	548.736,57	78
3. Pulau Flores dan Sekitarnya/ *Flores and its surroundings*	1.707.130	621.417	36,40	44,200	7,11
Jumlah / *Total*	4.738.920	1.667.962	35,19	740.009,95	44,37

*) *Rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan kesepakatan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur*
*) ***The consented plan of forest use design and confirmation in East Nusa Tenggara Province.***

Since some executive officers have been available in the Five-Year Development IV, it is then expected that forest confirmation willbe gained along 1,115 Km.

East Nusa Tenggara is a province having the greatest production of sandalwood in Indonesia. This material is converted into sandalwood oil, fan and statue.

The main areas producing sandalwood include the Districts of Southern Central Timor, Northern Central Timor, Belu and Kupang. This production is calculated on the basis of AAC (Annual Allowable Cut).

In the Five-Year Development I the production of sandalwood totalled 3,517,295 Kg. Then in the Five-Year Development II it decreased to be 2,235,658 Kg. And, in the Five-Year Development III t reached the lowest rate and only totalled 1,732,782 Kg. Decrease in the Five-Year Development II was among others caused by the policy on export limitation, which determined that sandalwood log allowable for export was only 40%, while the other 60% was manufactured domestically.

The result of recent inventory on the existing sandalwood trees indicates that the overall production totalls approximately 750 tons per year. From 1978 to 1982, the realization of annual average production amounted to ± 515 tons. See Table III - 6.

d. Sub-Sector of Plantation

The potency of horticultural cultivated land is approximately 50% of the extent of agricultural land (± 645,000 Ha). Horticultural plants which have become social commodities and played an important role for regional farmer's income (functioning as export commodities or as inter-island commodities) include coffe and coconut (copra).

The development of horticultural undertaking in East Nusa Tenggara in the period of 1978 through 1982 was done by intensifying long-life plants (yearly plants/hard plants) and short-life plants (one-season plants). The former include: coconut, coffe, cacao, clove, guava, vanilla, candlenut, lamtoro gung; while the latter are only limited to cotton-plant. Sugar-cane so far has not been developed yet.

A conclusion then can be drawn that the development of long-life horticultural plants (hard plants) in East Nusa Tenggara is very significant, since these plants have two advantages, ie supporting the economy and giving ecological profit. On this basis, in 1978 Regional Goernment established a Regional

Tabel / *Table III — 6*

PRODUKSI KAYU CENDANA DINAS KEHUTANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1978/1979 S/D 1982/1983 (S/D DESEMBER 1982)

THE PRODUCTION OF SANDALWOOD OF EAST NUSA TENGGARA FORESTRY DEPARTMENT FROM 1978/1979 TO 1982/1983 (UP DECEMBER 1982)

No Urt	Tahun *Year*	Jumlah Produksi dalam KG *Total of Production in Kg*						Jumlah Produksi *Total of Production (Kg)*
		Kupang *Kupang*	T T S *S C T*	T T U *N C T*	Belu *Belu*	S Timur *E. Sumba*	S Barat *W. Sumba*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1978/1979	11.885	138.001	277.392	143.601	6.471	7.813	585.163
2.	1979/1980	54.572	276.715	273.647	31.008	—	—	635.943
3.	1980/1981	42.756	282.890	29.123	—	—	—	354.769
4.	1981/1982	24.478	275.153	165.696	35.044	—	—	500.380
5.	1982/1983	2.131	232.567	30.389	31.901	—	—	296.988
	Jumlah / Total	135.831	1.205.326	776.247	241.554	6.471	7.813	2.373.243

Tabel / *Table III — 7*

HASIL PRODUKSI JENIS TANAMAN PERKEBUNAN PENTING DI NUSA TENGGARA TIMUR SELAMA TAHUN 1978 - 1982

THE RESULT OF ESSENTIAL HORTICULTURAL PLANTS PRODUCTION IN EAST NUSA TENGGARA IN THE PERIOD OF 1978 THROUGH 1982

No	Jenis Komoditi *Kind of Commodity*	Produksi / *Production*				(Ton) *(tons)*
		1978	1979	1980	1981 *	1982 *
1.	Kelapa/*Coconut*	31.179,72	29.673,45	30.298,6	29.013	29.303
2.	Kopi/*Coffee*	4.355,57	4.215,24	3.784,54	4.050,48	4.131
3.	Kapuk/*Capoc*	2.433,9	2.442,02	1.802,12	2.608,91	2.974
4.	Kemiri/*Candlenut*	2.987,25	3.146,25	4.340,27	3.461,10	3.564
5.	Pisang/*Banana*	3.573,6	3.304,63	3.319,4	2.542,91	2.670
6.	Jambu mete/*Cashew*	51,13	55,05	52,15	80,74	113
7.	Coklat/*Cocoa*	306,221	306,22	301,97	306,—	446
8.	Cengkeh/*Cloves*	4,38	3,184	33,688	7,048	9
9.	Jarak/*Castor*	233,3	227,5	24,9	58,5	—

*) Angka Sementara / ***Temporary Figures***
—) Tidak ada laporan / ***No report***

Tabel / *Table III — 8*

PERKEMBANGAN REALISASI ANTARPULAU KOMODITI PERKEBUNAN DI NUSA TENGGARA TIMUR SELAMA TAHUN 1981 - 1984

THE DEVELOPMENT OF INTER—ISLAND HORTICULTURAL COMMODITIES FROM 1981 TO 1984

No	Mata dagang komoditi *Kind of Commodity*	1981	1982	1983	1984	Rata-rata *Average*
01.	Kopra (ton)/*Copra (ton)*	12.568,4	16.465,9	17.613,2	12.624,8	14.818,1
02.	Minyak kelapa/*Coconut oil (1000 l)*	760,3	309,5	809,4	—	626,4
03.	Bungkil kopra/*Dried copra (ton)*	451,7	154,6	216,5	—	274,3
04.	Kemiri isi (ton)/*Hulled candlenut*	2.842,0	3.340,8	3.340,0	3.861,3	3.346,0
05.	Ketumbar/*Coriander seed (ton)*	273,2	55,0	72,2	206,6	151,8
06.	Kopi biji/*Coffee nuts (ton)*	1.893,0	3.346,0	2.314,8	470,8	2.006,1
07.	Serat kapok/*Capoc fibre (ton)*	39,2	177,7	1.677,1	3,1	474,3
08.	Pisang iris/*Sliced banana (ton)*	51,1	22,0	0,6	56,0	32,5
09.	Coklat/*Cocoa (ton)*	103,3	182,8	134,8	171,1	148,0
10.	Cengkeh/*Cloves (ton)*	14,2	4,4	1,8	60,0	20,1
11.	Asam/*tamarind (ton)*	3.505,1	2.437,4	3.588,6	3.640,7	3.292,9
12.	Jarak/*Castor (ton)*	140,4	110,7	22,2	125,9	124,8
	Jumlah / *Total*	22.642,1	26.606,8	29.891,2	21.220,0	25.315,3

dan Sumba.

Sentra produksi kapas dalam Pelita III adalah daerah Flores Tengah bagian Utara, yang meliputi Kabupaten Sikka, Ende dan Ngada, dengan pengelola PT Perkebunan XXVI.

Dalam Pelita IV, areal 10.000 Ha dipertahankan sehingga merupakan target tahunan setiap musim tanam. Sementara itu pengembangan kapas rakyat dengan sistem NES (Nucleus Estate Smallholders) diharapkan sudah dimulai di Kecamatan Kodi dan Laratama, Kabupaten Sumba Barat dan pada akhir Pelita IV (1988/1989) akan mencapai areal 10.000 Ha.

Regulation which obliged East Nusa Tenggara people in hard plants intensification.

The development of this undertaking is carried out by means of such activities as replanting, rehabilitation, intensification and extension of horticultural plants, while the fund required for this derives from both central and regional projects. The production of horticultural plants is not proportional yet to the increasing area extent. This is due to the fact that the total of young plants is in great number. Below is the development of horticultural plants production in the period of 1979/1980. See Table III - 7.

The development of several inter-island horticultural commodities in East Nusa Tenggara from 1981 to 1984 showed an enhancement. In 1981, copra commodity totalled 12,568.4 tons, then in 1982 increased to be 16,465.9 tons, in 1983 became 17,613.2 tons, and in 1984 only reached a total of 12,624.8 tons. In 1981, 12 horticultural commodities, on the whole, totalled 22,642.1 tons, then in 1982 26,606.8 tons, in 1983 29,891.2 tons and in 1984 only 21,220.0 tons. See Table III - 8.

In relation to the intensification of horticultural production, Regional Government make an effort by means of developing cotton-plant undertaking.

In the period of 1964 through 1970, cotton-plant development was conducted through Pulp State Plantation Company in Flores and Sumba.

the central spots of cotton-plant production during the Five-Year Development III were Northern Central Flores areas, inclusive of Kabupaten Sikka, Ende and Ngada, by the management of Plantation Ltd XXVI.

In the Five-Year Development IV an area of 10,000 Ha is in fixed maintenance, for it is programmed as the annual target in each planting season. Meanwhile, the development of smallholders' cotton-plant by NES system (Nucleus Estate of Smallholders) is expected to have begun in the Sub-Districts of Kodi and Laratama, Kabupaten West Sumba, so that at the end of Five-Year Development IV (1988/1989) it can reach an area of 10,000 Ha.

In 1982, a cotton-paeling factory with the capacity of 1,500 Kg per hour was established in Maumere. it is expected that this factory will be able to support the realization of the development of smallholders' cotton-plant.

e. Sub-Sector of Animal-Husbandry

Animal-husbandry potency in East Nusa Tenggara is great, especially in Sumba and Timor Island. Such a field has been a habitual activity from generation to generation, and so nearly all farmers in these areas know how to breed animals. Animal husbandry development is aimed at production increase, the hancement of breeders' income and employment opportunity and the implementation of protein and nutrition necessaries.

Area potency usable for the breeding of animals is great enough, ie 59.4% of the territorial extent (27,335.6 Km²). Yet, not all have been utilized yet, since the spread of water-holes in East Nusa Tenggara is not in a good distribution.

So as to promote East Nusa Tenggara role in implementing the need (both local and national) for breeding-animals, development efforts in the form of projects have been made during the four Five-year Development programs.

Pada tahun 1982 telah didirikan sebuah pabrik pengupas kapas yang berkapasitas 1.500 Kg jam di Maumere, sedangkan studi kelayakan dari daerah sentra produksi tersebut telah dilakukan September 1982. Pabrik ini diharapkan dapat menunjang program pelaksanaan pengembangan tanaman kapas rakyat.

c. *Sub sektor Peternakan*

Propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi besar di bidang peternakan, terutama di Pulau Sumba dan Pulau Timor. Kegiatan peternakan sudah membudaya turun temurun dan hampir semua petani di daerah itu mengenal ternak. Pembangunan peternakan lebih diarahkan kepada peningkatan produksi ternak; peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja petani ternak serta mencukupi kebutuhan protein dan gizi masyarakat.

Potensi areal yang dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ternak cukup besar, yaitu 59,4% dari luas wilayah 27.335,6 Km². Namun areal tersebut belum seluruhnya dapat dimanfaatkan. Ini dimungkinkan karena tidak meratanya penyebaran sumber air di daerah Nusa Tenggara Timur.

Untuk meningkatan peranan propinsi Nusa Tenggara Timur dalam memenuhi keperluan ternak baik untuk kepentingan lokal maupun Nasional, sejak Pelita I hingga Pelita IV dilakukan usaha-usaha meningkatkan dalam bentuk proyek.

Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan partisipasi masyarakat ternak, pemerataan pemilikan dan penyebaran ternak, pembinaan bibit ternak; pembinaan hijauan ternak; peningkatan kualitas ternak; pengamanan ternak dan peningkatan sarana usaha peternakan. Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan pusat pengembangan ternak dan pusat pembibitan Ternak (terutama sapi) untuk wilayah Indonesia lainnya. Tiga jenis sapi yang ada antara lain: Ongol di Pulau Sumba, Sapi Bali di Pulau Timor dan Sapi Madura di Pulau Flores.

Kebijaksanaan Pemerintah menjadikan pulau Sumba penghasil sapi jenis Ongol murni, kecuali untuk Australia — Brahman juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu genetik Sumba Ongol. Disamping itu pemerintah juga membuat kebijaksanaan untuk mengganti Sapi Madura di Flores dengan sapi Bali dari Pulau Timor.

Perkembangan populasi ternak di Nusa Tenggara Timur tiap tahun umumnya menunjukkan peningkatan. Populasi ternak sapi tahun 1978 sebesar 391.031 ekor; tahun 1979 meningkat menjadi 403.959 ekor. Kemudian dalam tahun 1980 menjadi 413.855 ekor. Sedangkan dalam tahun 1981 menjadi 454.571 ekor. Dalam tahun 1982 meningkat menjadi 465.935 ekor. Sementara tahun 1983 menjadi 485.925 ekor, kemudian dalam tahun 1984 sudah menjadi 554.349 ekor dan dalam tahun 1985 sebesar 568.827 ekor.

Untuk populasi kerbau 122.744 ekor (tahun 1978) meningkat menjadi 123.475 ekor (1979). Kemudian dalam tahun 1980 menjadi 124.218 ekor. Dalam tahun 1981 sudah menjadi 140.490 ekor, tahun 1982 sebesar 141.754 ekor, kemudian dalam tahun 1983 populasi kerbau 156.129 ekor. Tahun 1984 meningkat menjadi 170.240 ekor dan meningkat lagi menjadi sebanyak 171.261 ekor kerbau.

Sementara untuk ternak unggas dalam tahun 1978 sebesar 2.146.281 ekor tahun 1979 menjadi 2.548.157. Kemudian dalam tahun 1980 sebesar 2.721.998 ekor. Dalam tahun 1981 sebesar 2.505.357 ekor. Tahun 1982 meningkat menjadi 2.931.696 ekor. Sementara dalam tahun 1983 sebesar 3.016.998 ekor dan dalam tahun 1984 meningkat menjadi 3.131.383 ekor, demikian pula dalam tahun 1985 jumlahnya sudah mendapai 3.413.207 ekor unggas. Lihat Tabel III — 9.

Propinsi ini juga merupakan daerah penyumbang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Nasional akan daging dan ternak bibit. Dalam tahun 1983 telah dikeluarkan untuk sapi potong dan bibit sebanyak 48.647 ekor, tahun 1984 sebesar 67.659 ekor dan tahun 1985 sebesar 40.040 ekor. Ini terlihat dari volume perdagangan ternak potong dan bibit yang terus meningkat tiap tahunnya di wilayah ini. Realisasi pengeluaran ternak potong dan bibit dari daerah ini dari tahun 1978—1981 dan tahun 1983—1985. Lihat Tabel III — 10.

Perkembangan populasi ternak menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata untuk sapi 3,6%, kerbau 3,0%, unggas 8,7%, kuda 1,4%, babi 6% dan kambing/domba 3,9%.

Dari data yang diperoleh, sejak tahun 1976 hingga tahun 1980 angka pendapatan peternakan dari hasil ternak dalam ribuan rupiah atas dasar harga yang berlaku menunjukkan kenaikan yang cukup besar. Pada tahun 1976, misalnya angka pendapatannya mencapai 8.632.510 dan pada tahun-tahun berikutnya naik menjadi 11.996.958, kemudian 12.348.353 dan terakhir pada tahun 1979 mencapai 22.829.652. Angka itupun pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1980 terus menaik hingga mencapai 23.035.308.

Such efforts among others include the activationof breeder's participation, the equilibrium of breeding-animals ownership and dispersal, the promotion of breeding-animals germs, the promotionof breeding-animals's greenery, the enhancement of breeding-animals quality, the safety of breeding-animals and the enhancement of animal-husbandry facilities. Eas Nusa Tenggara is a central spot of developing breeding-animals and growing animal-germs (especialy cow) for other areas in Indonesia. Three sorts of cow available include Ongol in Sumba Island, Bali cow in Timor Island and Madura cow in Flores Island.

Government's policy in making Sumba Island be a centre of pure Ongol production is aimed at increasing Australian-Brahman and Sumba Ongol genetic quality. In addition, Government also endeavour to exchange Madura cow in Flores for Bali cow in timor.

In general the growth of breeding-animals in East Nusa Tenggara records an annual increase. In 1978, cow population totalled 391,031, in 1979 403,959, in 1980 413,855, in 1981 454,571, in 1982 465,935, in 1983 485,925, in 1984 554,349 and in 1985 568,827.

Buffalo population reached a total of 122,744 in 1978, then 123,475 (in 1979), 124,218 (in 1980), 140,490 (in 1981), 141,754 (in 1982), 156,129 (in 1983), 170,240 (in 1984) and 171,261 (in 1985).

Fowl population totalled 2,146,281 in 1978, then 2,548,157 (in 1979), 2,721,998 (in 1980), 2,505,357 (in 1981), 2,931,696 (in 1982), 3,016,998 (in 1983), 3,131,383 (in 1984) and 3,413,207 (in 1985). *See Table III - 9.*

East Nusa Tenggara is also a province giving sufficiently great contribution in the forms of meat and germs for the implementation of national needs. In 1983, slaughter-cows and germs brought out totalled 48,647, then in 1984 67,659 and in 1985 40,040. The volume of slaughter-animals and germs trade here continuously increases every year. *See Table III - 10.*

The following are the annual average percentage of breeding animals population increase: cow 3.6%, buffalo 3.0%, fowl 8.7%, horse 1.4%, pig 6% and goat/sheep 3.9%.

Based on the date acquired from 1976 to 1980, income in the form of thousand rupiah resulting from breeding-animals production on the applied price showed a great enough increase. In 1976, it amounted to 8,632,510, then in the subsequent years of 1977, 1978 and 1979 became 11,996,958, 12,348,353 and 22,829,652 respectively. A year later (1980), it increased and reached a total of 23,035,398.

Irrigation

To promote food production, irrigation received serious attention from the Regional Administration. In 1978 the rice field which technically irrigated extended to 13,448 hectares or 7% of the available agricultural area. This activity was programmed through Mbay-Lembor Project, Medium-Small and Simple Projects and Irrigation Rehabilitation Project. In 1982/1983 the area handled extended to 9,201 hectares or 27.5% of agricultural area. It constituted a rapid progress in view of the natural situation and condition in this region were not favourable.

Entirely the development activities in the field of irrigation had been held in small islands such as Rote island, Sabu, ALor, Adonara and Lembata island. Therefore, the farmers, as the water users in those areas had been accustomed to using irrigation water regularly or they had already known better how to grow rice.

The other positive impact that had been felt by the farmers as the result of irrigation function was the income per capita which was reaching US $80 per annum. Meanwhile the condition of the road which been functioned to connect towns of production contre with marketing towns was also able to support the development and promotion of irrigation. The economic life became smooth, and the difference between the production centre and consumption centre was not too far. This progress was arousing the farmers, the water users, in cultivating their rice field. They even were more delighted when the harvest had become twice a year.

Until the end of 1982, out of 6,000 hectares of potential area, about 3,477 hectares had been able to be irrigated covering the irrigation area of Wae Lembor as large as 1,200 hectares and irrigation area of Wae Kanta/Wae Serap as large as 2,277 hectares. Those activities had used the fund of Rp6,970,394,000. Such investment had proved to be useful for farmers in Lembor. This irrigation also enabled farmers to open new cultured area, and at the same time increase rice production. Rice production after the irrigation was built was about 6 - 8 tons of dry unpeeled rice per hectare.

In 1979/1980 the Government had begun the irrigation projects of Sumba, Rote and Sabu island. Out of 16,496 hectares of agricultural area which was programmed to be rehabilitated and promoted its production, until

Tabel / *Table III — 9*

POPULASI TERNAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1983
BREEDING—ANIMALS POPULATION IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE IN 1983

Kabupaten *District*	Luas Wilayah (Km) *Area Extent (Km2)*	Jumlah Penduduk (Orang) *Total of Population (people)*	Jumlah Ternak (Ekor) *Total of Breeding Animals*: Sapi/Sapi Perah *Cow*	Kerbau *Buffalo*	Kuda *Horse*	Kambing *Goat*	Domba *Sheep*	Babi *Pig*	Ayam Kampung *Village Hen*	Ayam Ras *Pedigree Hen*	Itik Itik *Duck*
01. Kupang	7.338,6	432.390	135.495	29.011	29.813	63.767	63.767	173.894	645.254	186.608	5.891
02. T T S	3.947,0	298.421	161.274	2.820	12.679	39.636	—	93.110	346.951	—	723
03. T T U	2.669,7	144.922	97.237	2.122	7.858	15.099	—	53.593	294.607	—	3.972
04. B e l u	2.445,6	187.844	86.652	16.980	11.424	38.475	—	61.982	215.448	3.886	22.376
05. A l o r	2.864,6	129.281	3.565	—	575	14.829	91	18.153	111.010	—	3.230
06. Flotim	3.079,2	261.773	783	17	4.675	41.056	4.984	55.721	111.911	8.057	8.391
07. Sikka	1.731,9	231.274	3.144	182	10.527	27.992	—	85.531	129.114	—	8.285
08. E n d e	2.046,6	210.062	5.318	3.187	4.589	10.621	79	41.248	109.472	6.864	14.286
09. Ngada	3.037,9	182.079	15.572	13.558	17.471	13.207	6.123	60.629	161.588	600	6.069
10. Manggarai	7.136,4	421.680	4.074	29.022	15.020	12.849	49	70.621	738.855	—	1.941
11. Sumba Timur	7.000,5	129.629	31.402	28.246	31.600	8.185	1.351	43.732	258.440	—	
12. Sumba Barat	4.051,9	242.935	9.833	45.095	23.002	11.660	—	78.412	408.738	—	5.919
N T T	49.349,9	2.944.131	554.349	170.240	169.233	334.503	76.444	836.581	3.131.383	206.015	85.597

Sumber data : Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I NTT.
Data Source : Animal-Husbandry Office of East Nusa Tenggara Province.

Pembangunan Pengairan

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan, maka bidang pengairan mendapat perhatian besar dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 1978 areal sawah yang dapat diairi secara teknis seluas 13.448 Ha. Atau sekitar 7% dari areal lahan pertanian yang ada. Kegiatan ini diprogramkan melalui Proyek Mbay—Lembor, proyek Sedang Kecil, Sederhana dan Proyek Rehabilitasi Irigasi. Pada periode 1982/1983 berhasil ditangani seluas 9.201 Ha, atau 27,5% dari areal lahan pertanian. Suatu kemajuan yang pesat mengingat situasi dan kondisi alam di daerah ini relatif kurang menguntungkan.

Secara keseluruhan kegiatan pembangunan di bidang pengairan telah menyebar sampai ke pulau-pulau kecil seperti Rote, Sabu, Alor, Adonara dan Lembata. Dengan demikian petani pemakai air di daerah-daerah tersebut sudah bisa memanfaatkan air irigasi secara teratur, atau lebih jauh petani sudah lebih mengenal tata cara bertani padi secara lebih baik.

Dampak lain yang lebih dirasakan para petani dengan berfungsinya irigasi tersebut, bahwa income per kapita telah mencapai US $ 80 per tahunnya. Kondisi jalan yang telah berfungsi menghubungkan kota-kota sentra produksi dengan kota pemasaran pun dapat menunjang pembangunan dan pengembangan irigasi. Kehidupan perekonomian menjadi lancar, dan perbedaan antara pusat produksi dan konsumen pun tidak terlalu menyolok. Kemajuan ini menggairahkan petani pemakai air dalam penggarapan sawahnya, apa lagi masa panen telah menjadi dua kali setahun.

Sampai akhir tahun 1982, dari areal potensial seluas 6.000 Ha telah dapat diairi + 3.477 Ha yang meliputi Daerah Irigasi Wae Lembor 1.200 Ha dan daerah irigasi Wae Kanta/Wae Serap 2.277 Ha. Kegiatan tersebut telah menelan dana sebesar Rp6.970.394.000. Investasi sebesar itu, terasa manfaatnya, terutama bagi para petani di Lembor. Dengan irigasi ini memungkinkan para petani membuka lahan baru, dan sekaligus meningkatkan produksi padi. Hasil produksi setelah adanya irigasi berkisar 6 - 8 ton/Ha gabah kering.

Pada tahun 1979/1980 Pemerintah telah membuka Proyek Irigasi Sumba, Rote dan pulau Sabu. Dari areal lahan seluas 16.496 Ha yang diprogramkan untuk direhabilitasi dan ditingkatkan produksinya sampai tahun 1982/1983 telah dicapai 5.931 Ha (kurang lebih 36%). Sementara itu areal sawah yang telah menggunakan air irigasi seluas 1.300 Ha dan jaringan tersier 705 Ha.

Dengan rehabilitasi tersebut, maka petani di daerah-daerah irigasi di Pulau Sumba, Rote dan Sabu telah memanfaatkan irigasi untuk mengolah sawahnya. Demikian pula pada beberapa lokasi yang tadinya merupakan areal tanah datar, kini telah mulai dicetak menjadi sawah baru dengan memanfaatkan irigasi tersebut.

Melalui proyek irigasi "Sedang Kecil" secara bertahap tampak adanya kemajuan yang cukup menggembirakan. Secara kumulatif hasil-hasil yang telah dicapai sampai tahun 1982 meliputi perluasan jaringan irigasi Sedang—Kecil dengan areal potensial 3.353 Ha. Bagi kalangan petani sendiri, baik dalam pemanfaatan air maupun cara-cara pengolahan lahan/penanaman telah menunjukkan peningkatan yang

Tabel / *Table III — 10*

PENGELUARAN TERNAK POTONG DAN BIBIT DARI TAHUN 1978-1985
BREEDING—ANIMALS POPULATION IN EAST NUSA TENGGARA
PROVINCE IN 1978 - 1985

Jenis Ternak *Kind of Breeding Animal*	Tahun *Year*: 1978	1979	1980	1981	1983	1984	1985
1. S a p i/Cow							
- Potong/Slaughter	21.263	30.104	30.806	28.759	41.517	59.755	33.376
- Bibit/Breeder	4.189	4.190	4.042	3.072	7.130	7.904	6.664
	25.452	34.294	34.848	32.461	48.647	67.659	40.040
2. Kerbau/*Buffaloes*							
- Potong/Slaughter *buffaloes*	2.285	4.820	4.931	3.878	3.684	7.887	9.534
- Bibit/Breeder	—	—	—	63	514	118	92
	2.285	4.820	4.931	3.941	4.198	8.005	9.626
3. K u d a/Horses							
- Potong/Slaughter *horses*	2.473	2.027	4.979	4.567	2.839	3.940	5.501
- Bibit/Breeders	55	230	133	57	37	148	612
	2.528	2.257	5.112	5.138	2.876	4.088	6.113
4. Kambing/Goats							
- Potong/Slaughter	333	315	405	528	40	414	—
- Bibit/Breeders	—	—	—	—	—500	875	
	333	315	405	528	40	914	875

Sumber : Data Dinas Peternakan Daerah Tingkat I dan Laporan Gubernur NTT dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 1986.
Source : Data were processed from Animal Husbandry Office of East Nusa Tenggara Province and East Nusa Tenggara Governor's Report resulting from the work visit of the Indonesian Vice President of July 29 - 31, 1986.

1982/1983 the realization reached 5,931 hectares (about 36%). The rice field that had used irrigation water was 1,300 hectares; while tertiary network had irrigated the area of 705 hectares.

With such rehabilitation, the farmers in the irrigation areas in Sumba island, Rote and Sabu island had used irrigation to cultivate their rice field. Similarly a few locations which formerly constituted flat land area now had been opened to be new rice field that took the advantage of the irrigation.

Through "Medium-Small" irrigation project gradually there as fairly promising progress. Accummulatively the achievement until 1982 covered the extension of Medium-Small irrigation network with the potential area of 3,353 hectares. The farmers, in using water as in cultivating their land, had shown considerable progress. Especially after the Operation Programme of Nusa Makmur that was started in 1981, the farmers were more encouraged to intensively cultivate their rice field.

Similarly the development of tertiary irrigation network project which was initiated in 1978/1979 had given a meaningful contribution to promote the farmers' income in this region.

After the completion of tertiary network, rice production increased to be 6 - 10 tons per hectare. It was a bulk increase in comparison with the rice production before tertiary network was built which was only 2 tons per hec-

cukup maju, apalagi setelah Program Operasi Nusa Makmur yang dimulai pada tahun 1981 lebih merangsang para petani untuk secara intensif mengolah sawahnya.

Demikian pada pembangunan proyek jaringan irigasi tersier yang dimulai tahun 1978/1979 telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan pendapatan petani di daerah ini.

Dibandingkan dengan hasil produksi padi/Ha sebelum dibangunnya jaringan tersier yang hanya mencapai 2 ton/Ha, dengan rampungnya jaringan tersier, produksi padi meningkat menjadi 6 - 10 ton. Luas areal irigasi yang telah selesai dibangun sampai tahun 1982 tercatat 33.110 Ha. Sedangkan areal yang dibangun konstruksi jaringan tersiernya mencapai 8.729 Ha, atau 26,4% dari luas areal yang telah dibangun jaringan utamanya. Program ini merupakan kebijaksanaan pengembangan areal pengairan Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pelita III.

Bidang Cipta Karya

Kebijaksanaan yang menyangkut sektor perumahan diarahkan terhadap pemugaran desa melalui proyek perintis dengan target 50% dari desa, atau sekitar 688 desa. Stimulan yang diberikan meliputi kegiatan pemugaran rumah dengan rata-rata 15 - 20 rumah tiap desa, perbaikan lingkungan, penyediaan air bersih, balai karya dan peralatan pertukangan.

Pada tahun 1978 desa yang dipugar baru mencapai 7 desa dengan jumlah terpugar 220 rumah. Kemudian pada tahun 1983, tercatat 174 desa, dengan jumlah terpugar mencapai 3848 rumah.

Untuk program perintisan Pemugaran Perumahan desa dari tahun 1978/1979 sampai dengan tahun 1982/1983 terealisir sebanyak 167 desa dengan biaya keseluruhan sebesar Rp936.553.700,- dengan jumlah pemugaran rumah sebanyak 3.568 buah; dan memberikan penyuluhan bagi 6.050 orang.

2. Industri

Secara sektoral daerah ini tergolong daerah "renggang industri", dengan kegiatan sektor industri masih terbatas pada sub sektor aneka industri dan industri/kerajinan yang dari segala seginya berskala kecil dan tradisional. Namun, perkembangan jumlah perusahaan industri dari Pelita I, II dan III menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.

Dalam Pelita I jumlah perusahaan 161 buah, meningkat dalam Pelita II menjadi 5.107 buah dan dalam Pelita III (tahun 1979 dan tahun 1980) sebanyak 4.492 buah perusahaan.

Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang; Industri makanan, minuman dan tembakau; Industri Tekstil, pakaian jadi dan kulit; Industri barang-barang kayu/meubelair; Industri kertas, barang-barang dari kertas dan penerbitan; Industri Kimia dan barang plastik; Industri barang-barang galian bukan logam, Industri dasar dan barang logam; Industri barang logam dan peralatan dan industri lain-lain.
Tabel III — 11

Untuk sub sektor industri logam dasar dan kimia dasar sementara belum menunjukkan kegiatan yang berarti. Hingga tahun 1969 laju pertumbuhan industri di Propinsi ini rata-rata mencapai 21,7%. Sedangkan prosentase sumbangan yang diberikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hanya sebesar 3,11%.

Sementara itu perkembangan pembiayaan dan program Proyek BIPIK dalam tahun anggaran 1980/1981 sebesar Rp60.167.000,-; tahun 1981/1982 meningkat menjadi Rp99.175.000,- kemudian dalam tahun 1982/1983 menjadi Rp117.980.000,-. Dana tersebut diperuntukkan bagi penyuluhan, peningkatan kemampuan pengrajin, promosi, informasi, bantuan hard ware, kegiatan penunjang dan overhead.

Industri Pengolahan Kulit

Menurut data tahun 1980, potensi sumber daya alam/ternak sebagai bahan baku industri pengolahan daging dan kulit di Nusa Tenggara Timur, cukup besar, ternak sapi 413.855 ekor, kambing/domba 56.950 ekor. Berdasarkan perhitungan proyeksi pengembangannya hingga tahun 1980 adalah sebagai berikut: 529.796 sapi, dan kambing/domba 590.328 ekor. Ini berarti merupakan angka yang cukup untuk mensuplai keperluan konsumsi dan industri pengolahan hasil ternak di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan itu, dapat diidentifisir beberapa proyek pengolahan kulit dan daging sebagai berikut: 100 unit abatoar standar, 120 unit pengeringan kulit, 5 unit penyamakan kulit sol, 1 unit penyamakan kulit hingga tingkat finishing dan 30 unit pengolahan daging berukuran kecil.

Juga dapat dilakukan beberapa industri hilir seperti industri pengolahan tulang, tanduk, kerajinan kulit dan lain-lain. Oleh karena

tare. The irrigation area which had been completely built until 1982 was 33,110 hectares large. The area of which tertiary network construction was built, reached 8,729 hectares or 26.4% of the area size that had been completed with primary network. This programme constituted the promotion policy of irrigation area in East Nusa Tenggara during Pelita III.

Work Creation Field (Bidang Cipta Karya).

The policy on housing sector is aimed at the restoration of village through pilot project with the target of 50% of villages or about 688 villages. The stimulants rendered covered the activity to restore te average of 15 - 20 houses in each village, environment improvement, clean water supply, creation hall and carpentry apparatus.

In 1978 the villages restored amounted to 7 villages only, and the houses restored were 220. In 1983 it was recorded that 174 villages with 3,848 houses were restored.

In 1978/1979 to 1982/1983 the pilot programme of rural housing restoration had operated in 167 villages, and had used the entire fund of Rp936,553,700,-. The houses restored amounted to 3,568, and field instruction had been given to 6,050 people.

2. Industry

Sectorally, this province is categorized as "rare industry" area. Activities in industrial sector are merely limited to various sub-sectors and handicrafts on a small and traditional scale. The growth of industrial companies, however, in the Five-Year Developments I, II and III showed a rejoicing increase.

In the Five-Year Development I the total of industrial companies reached 161, then in the Five-Year Development II 5,107 and in the Five-Year Development III (the years of 1979 and 1980) 4,492. These companies were involved in the fields of: food and beverage, tobacco, textile, garment and leather, wooden furniture, paper, publishing, chemicals and plastics, non-metal basic things, metal things and appliances, etc. See Table III - 11.

Meanwhile, sub-sector of basic-metal and basic chemicals industries has not shown a significant activity yet. Up to 1969, the rate of industrial growth in East Nusa Tenggara reached an average of 21.7%, while the percentage contribution to Gross Regional Domestic Product was only 3.11%.

The growth of expenditure and "BIPIK Project" programs is specified as follows: in the budgetary year of 1980/1981, totalling Rp60,167,000, in 1981/1982 Rp99,175,000 and in 1982/1983 Rp117,980,000. These funds were utilized for guidance, the enhancement of handicraftsmen's abilities, promotion, information, hardware aid, supporting activities and overhead.

Leather-Manufacturing Industry

The 1980 data indicates that the potency of natural resources/breeding-animals used as the principal materials for meat and leather manufacture in East Nusa Tenggara is great enough: 413,855 cows and 56,950 goats/sheep. Based on the projection calculation, the development up to 1980 was: 529,796 cows and 590,328 goats/sheep. It signifies that this total will be sufficient for the implementation of consumption needs and the manufacture of breeding-animals products in East Nusa Tenggara.

In relation to that the following meat and leather manufacturing projects have been identified: 100 units of standard abattoir, 120 units of leather-dryer, 5 units of sole leather covering, 1 unit of leather covering until finishing phase and 30 units of small-sized meat manufacture.

It is also possible to undertake downward industries dealing with bone and horn manufacture, leather handicraft, etc. On this account, Local Government expect not only the existence of "growth centre" but also "internal turnover" necessary for East Nusa Tenggara.

Weaving, Pulp

On the basis of the 1980 survey, the development of Samllholders' Cotton Intensification in Kabupaten Sikka, Ende, Ngada and West Sumba reached an area of 30,000 Ha, while the annual average production totalled 10,770 tons (clean cotton). The result of cotton planting trial conducted in 1981 in Sikka showed that DP-45 and SP-37 cotton kinds reached a total ranging from 800 to 1,500 Kg/Ha. A new system applied recently in East Nusa Tenggara for cotton commodity is the appointment of "Foster-Father" by Plantation Ltd XXVI functioning as capital and technology giver.

The result of the above is the constructions of 3 units of gennery with the average capacity of 8,000 tons cotton-seed per year in Sikka; Ngada and West Sumba and 3 units of thread weaving with the average capacity of 20,000 weaving stitches per unit and capability of absorbing 6,480 tons clean cotton.

Tabel / *Table III — 11*

PERKEMBANGAN JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRI PELITA I, II DAN PELITA III DI PROP NUSA TENGGARA TIMUR
THE GROWTH OF THE NUMBER OF INDUSTRIAL COMPANIES IN EAST NUSA TENGGARA DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT I, II AND III

No Jenis Industri / *Kind of Industry*	Pelita I *Five-Year Development I*					Pelita II *Five-Year Development II*					Pelita III *Five-Year Development III*			Keterangan *Remarks*
	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	
1. Ind Makanan Minuman dan Tembakau / *Food and beverages Tobacco Industries*	30	50	66	103	123	134	242	274	308	332	374	426	—	*)Sementara dikelola
2. Ind Tekstil, Pakaian jadi dan kulit/ *Textile, Garments and Leather Works*	3	3	3	3	3	2	167	246	285	310	505	1.070	—	
3. Ind Barang-barang kayu/Meubelaire/ *Wood products and furnitures*	12	15	18	19	19	43	90	115	114	165	183	326	—	
4. Ind Kertas, Barang-barang dari Kertas dan Penerbitan / *Paper, Paper products and Publication*	4	4	4	6	6	6	9	10	13	16	21	67	—	
5. Ind Kimia dan barang plastik/ *Chemical Industry and plastic goods*	10	13	15	15	16	19	38	39	438	446	73	62	—	
6. Ind Barang-barang galian bukan logam/ *Chemical Industry and plastic goods*	2	2	3	4	6	11	76	150	172	194	293	286	—	
7. Ind Dasar dan barang logam/ *Basic Industry and metal goods*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. Ind Barang Logam dan peralatan/ *Metal Industry and equipments*	4	5	6	8	9	12	38	83	171	202	236	148	—	
9. Industri lain-lain/*Miscellaneous Industries*	—	—	—	—	—	—	—	21	42	44	22	198		
Jumlah / *Total*	69	92	115	158	182	227	660	938	1.573	1.709	1.907	2.585	—	

Source Data : Kanwil Dep. Perindustrian Propinsi Nusa Tenggara Timur
Data Source : Industrial Office of East Nusa Tenggara Province.

itulah pemerintah setempat mengharapkan bukan saja timbul "growth centre", tetapi "internal turn over" bagi kepentingan Nusa Tenggara Timur.

Pemintalan, Pulp/Serat

Menurut survai tahun 1980, pengembangan Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) di Kabupaten Sikka, Ende, Ngada dan Sumba Barat mencapai total 30.000 ha. Kemampuan produksi rata-rata tiap tahun 10.770 ton serta kapas bersih. Hasil percobaan penanaman kapas tahun 1981 di Sikka menunjukkan bahwa kapas DP—45 dan SP—37 berkisar antara 800 hingga 1.500 kg/ha. Diterapkan sistem Bapak Angkat oleh PTP XXVI yang berperan sebagai pemberi input modal dan teknologi, merupakan suatu sistem yang baru diterapkan di Nusa Tenggara Timur untuk komoditi kapas.

Dengan potensi itu, dapat dibangun tiga unit gennery dengan kapasitas rata-rata 8.000 ton kapas biji/tahun di Sikka, Ngada dan Sumba Barat, tiga unit permintaan benang dengan kapasitas rata-rata 20.000 mata pintal per unit dan kemampuan penyerapan kapas bersih sebanyak 6.480 ton.

Garam Industri

Potensi areal penggaraman menurut penelitian yang disponsori UNDP seluas 11.000 ha, dengan konsentrasi cukup tinggi meski banyak mengundang campuran.

Keadaan lahan pada umumnya terdiri dari tanah liat yang cukup baik untuk tambak garam. Sedangkan sistem yang dijalankan saat ini dalam produksi garam rakyat adalah sistem non tambak. Areal yang tergarap mencapai 100 ha termasuk tambak garam Dinas Perikanan dalam tahun 1982. Data terakhir produksi garam rakyat mencapai ± 4.000 ton dengan jumlah tenaga kerja 2.300 orang. Umumnya merupakan usaha sampingan.

Produksi garam industri yang dihasilkan Propinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk menunjang keperluan bahan baku pabrik olefin di Aceh dan pabrik soda abu di Jawa Timur yang diperkirakan akan memerlukan garam industri 600 ribu ton/tahun. Hasil sampingan dari adanya pabrik garam industri gips, bahan baku refraktori ataupun pupuk kalium chlorida. Lokasi pabrik garam industri direncanakan di Oebelo, Kabupaten Kupang.

Industri Semen

Proyek semen di Kupang dengan kapasitas produksi sebesar 120.000 ton semen/tahun diperkirakan akan berproduksi merupakan industri hulu, yang disamping memenuhi kebutuhan pembangunan khususnya di Nusa Tenggara Timur, diharapkan pula akan menimbulkan efek ganda, dimana dapat dikembangkan jenis industri lain (down stream effect) seperti: pabrik eternit, galangan kapal ferry cement, pabrik batu tahan api, pabrik bahan bangunan lain seperti tegel, batako dan lain-

Industrial Salt

Based on the investigation sponsored by UNDP, the potency of salting area reaches an extent of 11,000 Ha with a sufficiently high concetration and many mixes.

The condition of cultivated land mostly consists of clayey soils good enough for salt water-pond. Yet, the system at present applied for the production of smallholders' salt is non-waterpond. The land cultivated totals 100 Ha, inclusive of salt water-pond of Fishery Office of 1982. The last data indicate that the production of smallholders's salt totals approximately 4,000 tons with manpower totalling 2,300 people. In general salt undertaking is considered a side-business.

The production of industrial salt in East Nusa Tenggara is meant to support the implementation of principal materials needed by olefin factory in Aceh and soda factory in East Java. It is estimated that industrial salt needed by these factories totals 600,000 tons per year. The side-results of industrial salt factory are gypsum and the principal materials of kalium chloride fertilizer. The location of industrial salt factory is planned in Oebelo, kabupaten Kupang.

Cement Industry

Cement project in Kupang with the production capasity of 120,000 tons/year is an upward industry. Besides implementing the development necessaries particularly in East Nusa Tenggara, it is also expected to have downward effects, by which other industries such as asbestos, fire-proof stone and other building materials (brick, tile, etc) can be develop. Inter-linkage between these industries and cement industry is hoped to create greater value.

Smallholder's Outstanding Handicrafts

One of the kinds of smallholder's handicrafts having high cultural significance is the traditional fastened weave. It is continuously produced up to the present time in order to implement the clothing needs of handicraftsmen and to increase handicraftsmen's income by selling it.

Owing to the many tribes existing in East Nusa Tenggara territory, the appearance of each handicraft product varies from one another. This difference is reflected inthe style and basic colours performed. Nowadays, however, it begins to disappear and is even not applied in handicraft production.

The products of handicraft are in general in the forms of sarong, shawl and blanket with various styles and special colour designs reflecting arts and culture belonging to each ethnic group. So as to implement consumers' requests, recent products include table-cloth, pillow-case, bed-cover, sarong, etc. The traditional weaves recorded in all parts of East Nusa Tenggara Province total 640 units with 31,946 handicraftsmen and the annual production capacity of ± 1.6 million meters woven cloth.

The principal material of East Nusa Tenggara weave is cotton yarn/staple fibre. Every year 400 - 600 tons year with natural colours and textile-colours

lain. Interlinkages antar sektor industri tersebut dengan industri semen diharapkan akan membawa nilai tambah yang lebih besar.

Potensi Kerajinan Rakyat yang Menonjol

Kerajinan rakyat jenis tenun Ikat Tradisional merupakan salah satu jenis kerajinan warisan yang memiliki nilai-nilai seni budaya yang cukup tinggi. Hingga kini terus dibuat guna memenuhi keperluan sandang keluarga pengrajin, dan dipasarkan untuk menambah pendapatan keluarga pengrajin itu sendiri.

Sehubungan dengan banyaknya suku bangsa yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini, maka penampilan tiap suku bahkan sampai kepada tiap golongan sosial masyarakat melalui hasil kerajinan, juga berbeda. Perbedaan ini tercermin pada motif dan warna dasar dari hasil kerajinan. Namun hingga kini perbedaan-perbedaan tersebut telah mulai hilang, bahkan dapat dikatakan tidak berlaku lagi.

Hasil kerajinan ini biasanya dalam bentuk kain sarung, selendang dan selimut dengan berbagai motif dan tata warna yang yang khas, mencerminkan seni budaya masing-masing suku bangsa. Sesuai dengan permintaan konsumen, bentuk dari pada hasil akhir bervariasi yang meliputi berbagai bentuk seperti: taplak meja, bed cover, sarung bantal, kain sarung dan lain-lain. Secara keseluruhan jumlah tenun tradisional yang tercatat di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur sebanyak 640 buah dengan jumlah pengrajin sebanyak 31.946 orang. Dari jumlah pengrajin tersebut meliputi kapasitas produksi per tahun kurang lebih mencapai 1,6 juta meter kain tenun.

Untuk bahan baku tenun, di Propinsi Nusa Tenggara Timur biasa dipergunakan dari bahan benang katun staple fibre. Setiap tahunnya mencapai sekitar 400 - 600 ton benang dengan bahan penolong berupa cat pewarna alam (nabati) dan cat pewarna buatan (cat tekstil). Pemasarannya meliputi daerah setempat (lokal), nasional, bahkan sampai di tingkat internasional.

Kerajinan Anyam-anyaman

Sebagaimana halnya dengan kerajinan tenun tradisional, kerajinan anyam-anyamanpun tersebar di seluruh pelosok daerah pedesaan, yang hampir meliputi seluruh wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Kabupaten-kabupaten Manggarai, Ende, Kupang, Alor dan beberapa Kabupaten lainnya.

Jumlah sentra meliputi 166 buah dengan pengrajin mencapai 9.400 orang serta melibatkan kapasitas produksi sebesar ± 270.000 buah per tahun. Untuk jenis kerajinan tersebut, biasa dipasarkan pada tingkat nasional, sebab faktor permodalan yang sangat terbatas. Bahan bakunya terdiri dari daun pandan, daun lontar dan irisan bambu. Oleh sebab itu bentuk produksinya berupa topi dengan berbagai bentuk, tempat sirih, tas, tikar dan lain-lain.

Perkembangan Industri Hingga Pelita III

Secara kuantitatif, perkembangan industri di Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada akhir Pelita II (1978) jumlah perusahaan baru tercatat 1.709 buah dengan nilai produksi sebesar Rp13.171.957.000,- dan pada tahun ke tiga (1981) jumlah perusahaan meningkat menjadi 2.112 buah, dengan nilai produksi Rp18.224.127.000,-.

Kenaikan rata-rata selama Pelita II hingga kini adalah sebagai berikut: jumlah usaha 7,89% per tahun dan nilai produksi dengan rata-rata 10.,3% per tahun. Secara global peningkatan tersebut disebabkan karena membaiknya organisasi dan manajemen usaha, terciptanya "iklim usaha yang sehat", melalui kemudahan-kemudahan, perlindungan dan peraturan lainnya, yang disediakan oleh pemerintah dan dunia usaha umumnya.

Keterbatasan dana yang tersedia, tenaga dan sarana penunjang, merupakan salah satu hambatan utama dalam usaha peningkatan dan pembinaan industri yang terus ditingkatkan melalui dua pendekatan yakni pendekatan mikro dan pendekatan makro. Pendekatan mikro berupa bantuan langsung kepada pengusaha, baik berupa perangkat keras maupun lunak, sedangkan pendekatan makro berupa bantuan tidak langsung, yang justru menunjang suatu iklim usaha yang sehat, yakni lewat peraturan/kebijaksanaan seperti: Reservationsceme KIK/KMKP, Kredit Mini, keringanan pajak/retribusi dan lain-lain.

Dengan adanya kemajuan di sektor pertanian, maka ekselerasi sektor industri sangat diperlukan, dan secara khusus suksesnya "Operasi Nusa Makmur" di satu pihak memerlukan ekselerasi sektor industri terutama pengolahan hasil panen. Di lain pihak, hasil penelitian terhadap potensi bahan baku untuk menunjang "Industri Hulu/Industri Kunci", ternyata bahwa terdapat beberapa komoditi yang dapat diolah dengan menggunakan modal dan teknologi yang tinggi seperti: Semen, Garam, Serat dari pohon Eucalypus, Asbes, Kaolin dan lain-lain. Bahan tersebut sebagian sedang dalam taraf penelitian, sebagian belum diteliti secara

are needed. The products are then marketed locally, nationally and internationally.

Plaiting Handicraft

Like traditional weave handicraft, plaiting handicraft also scatters in all corners of East Nusa Tenggara, especially in Kabupaten Manggarai, Ende, Kupang, Alor and some others.

There are 166 plaiting units with 9,400 handicraftsmen and the annual production capacity of ± 270,000. This kind of handicraft is only marketed nationally, for it has very limited capital. The principal materials utilized consist of Pandanus leaves, palm-leaves and bamboo slices,while the products are in the forms of hats (having various types), sirih-boxes, bags, sleeping-mats, etc.

The Growth of Industry up to the Five-Year Development III

Quantitatively, the growth of industry in East Nusa Tenggara tends to increase continuously. At the end of Five-Year Development II (1978) industrial companies only totalled 1,709 and had a production value of Rp13,171,957,000. But, in 1981 this number became 2,112 with a production value of Rp18,224,127,000.

From the Five-Year Development II up to the present time annual average increase in industrial companies is 7.89%, while that inproduction value 10.3%. Globally, this enhancement has been due to the betterment of organization and management, the presence of "healthy business atmosphere", facilities, protection and regulations prepared by Government and business society.

The restriction of available fund, manpower and supporting facilities is one of the main obstacles in industrial enhancement efforts. Nevertheless, micro-approach and macro-approach are continuously conducted so as to realize such efforts. The former include direct aids given to businessmen (in the forms of hard and soft equipment), while the latter are in the forms of indirect aids which support the realization of a healthy business atmosphere (given by means of regulations/policy such as reservation scheme of Small Investment Credit/Permanent Working Capital Credit, mini-credit, tax relief, etc).

In fact, agricultural enhancement greatly requires the acceleration of industrial sector. In particular, the success of "Nusa Makmur Operation" depends upon this acceleration, especially in the manufacturing of crop production. Besides, the result of investigation on principal materials supporting "Upward Industry/Key Industry" indicates that several commodities have to be manufactured with considerable capital and high technology. These commodities include: Cement, Salt, Pulp of Eucalyptus, Asbestos, Kaolin, etc. Some of them have been on investigation, while the rest are expected to be investigated during the Five-Year Development IV.

It is hoped that the presence of Upward Industry will implement the demands for a very firm and solid foundation needed in the development of industrial sector. In addition, the targets of the Basic Design of Long-Term Development, particularly in industrial sector, will also be attained. Another expectation considered important enough is the realizationof a great deal of employment opportunities and economic balance structure of the sectors of agriculture, industry, mine, trade, energy, service,etc. See Table III - 12.

In relation to the development of industrial area in East Nusa Tenggara, it is necessary to make a profound study. Mean while, the result of an investigation conducted by EIRDS-CIDA in 1976 can be used as a basis for industrial development, especially in East Nusa Tenggara.

The following is a list of projects recommended by EIRDSCIDA in 1976 for East Nusa Tenggara Province: Tapioca Manufacture, Peanut Processing, Coffee Processing, Lontar Distilling (alcohol), Cane-Sugar Factories, Foot Wear, Leather Tanning, Furniture, Building Materials (steel), Building Materials (wood), Agri Equipment, Seaweed Preparation, Kemiri Processing, Feed Pelletizing, Clothing, Cotton Spinning, Handloom Textile Weaving, Cotton Ginning, Fish Processing, Dried Meat, Slaughter Plant, Meat Canning Plant, Fruit Processing, Handicraft.

3. Investment

Investment policy in East Nusa Tenggara is in accordance with that applied nationally and is harmonized with the potency and policy of regional development. Regional Investment Coordination Board was established in East Nusa Tenggara in 1981. In spite of the fact that it has so far had to confront many problems and difficulties considered serious enough, investment activities involved in it show an increase.

In the budgetary year of 1981/1982, a study project for the development of East Nusa Tenggara investment which costed Rp10,000,000 was carried out. The result of this was a book entitled Investment Potency Book and its charts. In the budgetary year of 1982/1983, a study projcet for the development

mendalam, dan diharapkan digarap dalam Pelita IV nanti.

Dengan dibangunnya Industri Hulu tersebut diharapkan terpenuhi tuntutan adanya landasan yang cukup dalam.dan kuat bagi perkembangan sektor industri lebih lanjut. Disamping itu pemenuhan akan sasaran menurut pola dasar pembangunan jangka panjang, khususnya di sektor industri juga akan terpenuhi. Harapan lain yang dirasa cukup penting adalah terealisasinya perkembangan lapangan kerja yang besar, sekaligus pembangunan struktur perekonomian yang seimbang dan terpadu antara sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan, energi, jasa dan lain-lainnya. Banyaknya perusahaan Industri, Tenaga Kerja, Produksi dan Pendapatannya per Kabupaten di NTT. Lihat Tabel III-12.

Dalam hubungan dengan pembangunan kawasan industri di Nusa Tenggara Timur, suatu studi yang mendalam perlu diadakan tetapi sambil menunggu adanya studi seperti yang dimaksudkan tersebut hasilnya telah dilakukan oleh EIRDS—CIDA 1976 dapat dijadikan suatu landasan pengembangan industri khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut ini dapat dilihat daftar proyek industri yang direkomendasi oleh EIRDS—CIDA tahun 1976, yang dikerjakan di Propinsi Nusa Tenggara Timur: Tapioka Manufacture, Peanut Processing, Coffee Processing, Lontar Distilling (alcohol), Cane Sugar Factories, Foot Wear, Leather Tanning, Furniture, Building Materials (Steel), Building Materials, Building Materials (wood), Agri Equipment, Seaweed Preparation, Kemiri Processing, Feed Pelletizing, Clothing, Cotton Spinning, Hand loom Textile Weaving, Cotton Gining, Fish Processing, Dried Meat, Flaughter Plant, Meat Canning Plant, Fruit Processing, Handcraft.

Penanaman Modal

Kebijaksanaan penanaman modal di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan kebijaksanaan Nasional, yang dipadukan dengan potensi dan kebijaksanaan pembangunan daerah. Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) baru dibentuk di Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1981 dan tantangan serta masalah yang dihadapi BKPMD cukup berat. Namun demikian kegiatan Penanaman Modal menunjukkan perkembangan meningkat.

Dalam tahun anggaran 1981/1982 telah dilaksanakan proyek studi Pengembangan Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan biaya Rp10.000.000,-. Dari proyek ini dihasilkan Buku Potensi Penanaman Modal beserta petanya.

Tahun anggaran 1982/1983 diadakan proyek studi pengembangan komoditi ekspor dengan biaya Rp15.000.000,-. Dengan proyek studi pengembangan komoditi ekspor diharapkan setiap potensi yang menonjol minimal ada sebelum dikerjakan studynya. Keadaan ini akan memudahkan dalam penyusunan kebijaksanaan dalam rangka investasi, kegiatan informasi dan untuk memberikan gambaran secara umum kepada para investor.

Proyek meningkatkan promosi investasi daerah Nusa Tenggara Timur, disamping sebagai tindak lanjut dari hasil proyek studi pengembangan komoditi ekspor juga merupakan kegiatan rutin. Upaya ini ditempuh mengingat potensi Nusa Tenggara belum cukup dikenal para investor.

Sementara hasil-hasil yang telah dicapai oleh BKPMD adalah;

a. Setiap tahun dihasilkan bahan penyusunan DSP (Daftar Skala Prioritas).
b. Inventarisasi dari investor di NTT.
c. Buku Penelitian Potensi Penanaman Modal Propinsi Nusa Tenggara Timur beserta petanya.
d. Mengadakan promosi/pameran di Jakarta Fair.
e. Mengadakan temu usaha.
f. Menginventarisasi pengusaha-pengusaha yang potensial.
g. Menata organisasi dan meningkatkan kemampuan personil BKPMD.

Perusahaan/investor yang telah melakukan kegiatan investasi dari tahun 1971 s/d 1982 sebanyak 7 buah perusahaan, terdiri dari PMDN dan 1 PMA. (Lihat Tabel III-13 dan III-14).

Realisasi penanaman modal di daerah ini relatif masih sedikit, begitu pula hasil kegiatan bidang ini.

Perdagangan

Kebijaksanaan Pemerintah dalam perdagangan luar negeri adalah meningkatkan ekspor non-migas terutama non tradisional dengan mengembangkan dan menyederhanakan prosedur ekspor. Usaha peningkatan ekspor diarahkan untuk kontinuitas pemasaran. Juga dikembangkan diversifikasi ekspor, baik vertikal maupun horizontal dengan pasar yang makin tersebar di luar negeri.

Tabel III — 12

PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR, SEDANG, TENAGA KERJA, PRODUKSI DAN PENDAPATANNYA DIPERINCI PER KABUPATEN *)
DATA 1980

BIG AND MODERATE INDUSTRIAL COMPANIES, MANPOWER, PRODUCTION AND INCOMES SPECIFIED IN EACH KABUPATEN THE 1980 DATA

Kabupaten *District*	Jumlah Perusahaan *Total of Companies*	Jumlah Tenaga kerja (Orang) *Total of Employees*	Upah Tenaga kerja (Rp 000) *Payment of Employees (in thousand rupiah)*	Nilai Produksi (Rp 000) *Production Value (in thousand rupiah)*	Pendapatan Penerimaan lainnya (000) *Other Income (in thousand rupiah)*
1. Sumba Barat	4	116	22.250	47.248	—
2. Kupang	5	125	516.330	762.126	17.697
3. Belu	1	87	36.132	131.976	—
4. Alor	1	—	—	—	—
5. Sikka	3	148	30.417	254.366	32.076
6. Ende	2	114	47.156	129.647	—
7. Ngada	2	—	—	—	—
8. Manggarai	1	54	2.527,4	3.469	—
Jumlah / *Total*	19	644	654.866,4	1.328.832	49.773

*) *Data tahun*

of export commodities which costed Rp15,000,000 was implemented. It was expected that this project could find out any outstanding potency prior to its study. This kind of circumstance would simplify the arrangement of investment policy, information activities and the giving of general descriptions to investors.

Besides as the follow-up of study projects for the development of export commodities, projects for investment development in East Nusa Tenggara are done as routine activities. This is due to the fact that East Nusa Tenggara potency is not well-known yet to investors.

The following are the achievements gained by Regional Investment Coordination Board:

a. Materials acquired annually for the arrangement of List of Priority Scales.
b. Inventory of investors in East Nusa Tenggara.
c. Investment Potency Book and its charts.
d. Promotions/Exhibitions held in Jakarta Fair.
e. Business meeting.
f. Inventory of potential businessman.
g. Organization arrangement and the betterment of Regional Investment Coordination Board personnels' abilities.

Companies/Investors having conducted investment activities in the period of 1971 through 1982 totalled 7 units (6 Domestic Investments and 1 Foreign Investment). See Table III-13 and III-14.

4. Trade and Commerce

Government policy for overseas trade is emphasized on efforts of enhancing non-oil/-gas and non-traditional exports by better and simpler procedures. These efforts are directed at the continuity of marketing. In addition, export diversification is also applied, both vertically and horizontally, with markets spread more and more in foreign countries.

The growth of commodities export of East Nusa Tenggara in the period of 1978 through 1982 increased by 129.46% and 595.82%.

In the Five-year Development I export volume totalled 59,992.360 tons with the value of US$11,410,053.87. In the Five-Year Development II it was 26,853.751 tone with the value of US$21,564,040.48. In the Five-Year Development III it became 59,944.108 tons with the export value of US$47,105,447.97. In 1984/1985 (Five-Year Development IV), it was 1,422.238 tons with the value of US$2,173,140.02.

The value of commodities export deriving from East Nusa Tenggara (consisting of 25 kinds of commodities) reached a total of US$11,410,053.87 in the Five-Year Development I. In the Five-Year Development II it increased to be US$21,564,040.48. In the Five-Year Development III it became US$47,105,447.97. And, in the Five-Year Development IV (for the year of 1984/1985) it was US$2,173,140.02. See Table III - 15.

Like coffee, fresh-fish commodity deteriorated by 23.16%, both its volume and value. Overally, the export value of East Nusa Tenggara Province in 1981 totalled US$6,621,295.42, while that in 1980 was US$10,432,499.00. Thus, there was a deterioration by US$3,811,204.48 (36.53%).

Tabel / *Table III — 13*

BANYAKNYA PERUSAHAAN DAN INVESTOR DI NTT TAHUN 1971 — 1982
TOTAL OF COMPANIES AND INVESTORS IN EAST NUSA TENGGARA, 1971 - 1982

No	Tahun *Year*	Nama Perusahaan *Name of Company*	Status *Status*	Bidang Usaha *Business Field*	Jumlah Investasi *Total of Investment*	Lokasi *Location*
1.	1971 - 1980	PT Tropical Oil	PMDN *Domestic Investment*	Penyulingan minyak Cendana/ *Sandal wood Oil Distillery*	Rp250.000.000,-	Kupang
2.	1971 - 1980	CV Sumber Agung	PMDN/ *Domestic Investment*	Penyulingan minyak cendana/ *Sandal wood Oil Distillery*	Rp125.000.000,-	Kupang
3.	1971 - 1980	CV Tim Lico	PMA *Foreign Investment*	Peternakan *Cattle-breeding*	Rp3.328.000,-	T T U
4.	1980 - 1981	PT Komando Timor Jaya LTD	PMDN/ *Domestic Investment*	Industri Penyamakan Kulit Hewan/ *Leather Tannery*	Rp1.087.102.000	Kupang
5.	1980 - 1981	PT Bina Mulya Ternak	PMDN/ *Domestic Investment*	Peternakan *Cattle-breeding*	Rp132.964.930,-	Sumba Timur
6.	1981 - 1982	PT Semen Kupang	PMDN/ *Domestic Investment*	Industri Semen Portland/ *Portland Cement Industry*	Rp10.064.276.309,21	Kupang
7.	1981 - 1982	PT Bangun Antar Nusa	PMDN/ *Domestic*	Perikanan/ *Fishery*	Rp550.500.000,-	Kupang

Sumber : BKPMD DATI I NTT
Source : Regional Investment Coordination Board of East Nusa Tenggara Province.

Tabel / *Table III — 14*

STATUS TANAH YANG DIPAKAI INVESTOR SELAMA PELITA III
LAND STATUS USED BY INVESTORS DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

Nama Perusahaan *Name of Company*	Hak Guna Bangunan *Building Right*	Hak Sewa Hak Pakai *Usufruct*	Hak Guna Usaha *Long-lease lease Right*	Luas Areal *Area Extent*	Lokasi Operasi *Operational Location*	Keterangan *Remarks*
1. PT Tropical Oil	—	HP No 89	—	1.507 M2	Kupang	
		HP No 90	—	4.429 M2	Kupang	
2. CV Sumber Agung	HM 460	—	—	10.907 M2	Kupang	
3. PT Bina Mulya Ternak	—	—	No19/ HGU/DA /77.	9.908 Ha	Kabaru/ Sumba Timur	
4. PT Timor Livestock Compagny	—	— 1972	No 1 Thn No 2 Thn 1972	5.000 Ha T T U 20.000 Ha	Mena/ Kab	Terpakai seluas 8.000 Ha/*Using up to 8,000 Ha.*
5. PT Bangun Antar Nusa	—	—	—	28.900 M2	Kupang	Dalam taraf cadangan tanah *On the stage of land allocation*
6. PT Semen Kupang	—	—	—	1.321 Ha	Kupang	Lokasi pengambilan bahan baku *Location raw materials exploit*
				52.500 M2	Kupang	Lokasi bangunan pabrik
7. PT Pabrik Gula Besi Kama	—	—	—	1.500 Ha	Belu	Dalam taraf pencadangan tanah/*On the stage of land allocation*
8. PT Komodo Timor Jaya LTD	—	—	—	10.000 M2	Kupang	Belum ada penyelesaiannya *Still in process*

Sumber : BKPMD DATI I NTT.
Source : Regional Investment Coordination Board of East Nusa Tenggara Province.

Perkembangan ekspor komoditi asal NTT dari tahun 1978 hingga tahun 1982 menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 129,46% dan 595,82%.

Dalam Pelita I volume ekspor 59.922,360 ton dengan nilai ekspor US $ 11.410.053,87. Dalam Pelita II volume ekspor 26.853,751 ton dengan nilai US $ 21.564.040,48. Pelita III volume ekspor 59.944,108 ton dengan nilai US $ 47.105.447,97. Sedang dalam tahun 1984/85 (Pelita IV) volume ekspor 1.422,238 ton dengan nilai ekspor US $ 2.173.140,02. (Lihat Tabel III — 15).

In the period of 1979 - 1983, a fluctuation of export volume and value occurred. For example, export value in 1979 was US$12,933,206.73, while that in 1978 US$4,485,537.91 - an increase by US$8,447,669.82 (188.33%). Export volume in 1978 totalled 2,950.2 tons, while that in 1979 was 5,498.6 tons - increasing by 86.38%.

Even if the kinds of export commodities are still restricted to coffee, sandalwood oil, sandalwood lees and seaweed, the result of development efforts for diversifying export commodities which have been made since 1978 begins to appear, such as wetfish and seaweed exports. (See Table III-16).

Tabel / *Table III — 15*

REALISASI EKSPOR NUSA TENGGARA TIMUR SELAMA PELITA I, II, III DAN IV

THE REALIZATION OF EAST NUSA TENGGARA EXPORT DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT I, II, III AND IV

Pelita *Five-Year Development*	Realisasi Ekspor /*Export Realization*	
	Volume (Ton) *Volume (tons)*	Nilai (US $) *Value (US $)*
(1)	(2)	)3)
Pelita I	**59 922,360**	**11 410 053,87**
1969/1970	14.134,911	1 576 050,75
1970 / 1971	15 355,211	2 661 370,43
1971 / 1972	12 542,812	2 116 646,27
1972 / 1973	10 357,145	2 836 116,38
1973 / 1974	7 534,281	2 219 869,24
Pelita II	**26 853,751**	**21 564 040,48**
1974/1975	9.422,181	4.160.583,45
1975 / 1976	5 409,630	3 602 239,16
1976 / 1977	6 210,162	5 497 865,70
1977 / 1978	2 846,848	4 059 633,00
1978 / 1979	2 964,960	4 243 719,17
Pelita III	**59 944,108**	**47 105 447,97**
1979 / 1980	6 991,400	13 992 670,41
1980 / 1981	15 097,300	10 222 806,58
1981 / 1982	12 504,343	6 638 929,40
1982 / 1983	20 926,915	11 479 312,91
1983 / 1984	4 424,150	4 771 728,67
Pelita IV	**1 422,238**	**2 173 140,02**
1984 / 1985	1.422,238	2 173 140,02

Keterangan. Data Pelita IV untuk Triwulan I tahun 1984/1985 (April s/d Juni 1984)

Note: Five-Year Development IV data for the first three months of 1984/1985 (April to June 1984).

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Source : Trade and Commerce Office of East Nusa Tenggara Province.

Sementara ekspor komoditi dari Propinsi NTT yang terdiri dari 25 jenis komoditi dalam Pelita I bernilai US $ 11.410.053,07. Meningkat dalam Pelita II menjadi US $ 21.564.040.48, dan dalam pelita III meningkat menjadi US $ 47.105.447,97, dan dalam Pelita IV memperlihatkan angka menggembirakan senilai US $ 2.173.140,02 untuk tahun 1984/1985.

Selain kopi, komoditi ikan basah mengalami penurunan sebesar 23,16%, baik volume maupun nilainya. Secara keseluruhan nilai ekspor Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1981 tercatat US $ 6.621.295,42, dibanding tahun 1980 sebesar US $ 10.432.499,00 (penurunan nilai sebesar US $ 3.811.204,48 (atau 36,53%).

Ternyata terjadi fluktuasi volume maupun nilai ekspor dalam periode 1979—1983. Misalnya nilai ekspor tahun 1979 tercatat US $ 12.933.206,73 dibandingkan dengan US $ 4.485.537,91 di tahun 1978, memperlihatkan kenaikan sebesar US $ 8.447.669,82 (188,33%). Ini berarti suatu kenaikan yang belum pernah terjadi selama ini. Dari segi volume ekspor terjadi kenaikan dari 2.950,2 ton tahun 1978 menjadi 5.498,6 ton tahun 1979 atau kenaikan sebesar 86,38%.

Meskipun jenis komoditi ekspor masih terbatas pada kopi, minyak cendana, ampas cendana dan rumput laut, namun usaha mengembangkan anekaragam komoditi ekspor sejak tahun 1978 mulai terlihat, hasilnya seperti ekspor ikan basah dan rumput laut Hongkong. Lihat Tabel III-16.

a. Perdagangan Dalam Negeri

Perkembangan perdagangan dalam negeri, baik antar daerah dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun antar wilayah propinsi selama tahun 1979 memperlihatkan prospek yang cukup baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun sektor perhubungan laut yang menunjang kelancaran perdagangan masih menghadapi beberapa hambatan.

Pola perdagangan yang berorientasi kepada pemasaran di Jawa Timur (Surabaya) masih dominan, apakah untuk arus barang masuk maupun ke luar.

Kebutuhan pokok masyarakat dan juga barang-barang penting lainnya sebagian besar didatangkan dari Surabaya dan Ujung Pandang. Dalam pada itu untuk hasil-hasil produksi lainnya, terutama ternak, pemasarannya adalah Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, Maluku dan Irian jaya.

Disamping itu volume barang masuk melalui beberapa pelabuhan di Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 1978 - 1979 tecatat 258.512,6 ton dibandingkan pada tahun 1978 207.227,3 ton (naik sekitar 24,74%), sedangkan bahan bakar minyak tercatat 63.801 kilo liter pada tahun 1978. Terhadap barang-barang ke luar volumenya mencapai 33.317 ton ditambah 47.188 ekor ternak. Sementara itu

a. Domestic Trade

The growth of domestic trade, both inter-area of East Nusa Tenggara and inter-province, in 1979 showed a better prospect thanthose n the previous years, even though sea communication sector supporting it confronted several hindrances at that time.

Trade pattern oriented to the marketing in East Java (Surabaya) still seems dominant, either for incoming or outgoing goods.

People's principal necessaries and other essential goods are in majority derived from Surabaya and Ujung Pandang. The marketing of several kinds of products, especially breeding animals, includes such areas as Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, Maluku and Irian Jaya.

In the period of 1978 to 1979, the volume of incoming goods via some harbours in East Nusa Tenggara Province totalled 258,512.6 tons, while that in 1978 was 207,227.3 tons - an increase of approximately 24.74%. Oil fuel reached a total of 63,801 kilolitres in 1978. The volume of outgoing goods totalled 33,317 tons plus 47,188 breeding-animals. In 1981, the outgoing volume of various smallholder's products totalled 58,461 tons, 41,443 breeding-animals and 6,567,726 baby fishes (Chanos-chanos kind).

b. The Promotion of Puny Economic Group

In promoting and intensifying the commercial undertaking of Puny Economic Group, various upgrading and consultations have been conducted. This project is a cooperation between Trade and Cooperatives Department and Undana Management Institute, Kupang.

The kinds of promotion activities held in the period of 1978 through 1981 in several districts include: Puny Entrepreneurs Upgrading, Young Entrepreneurs Upgrading, Consultations and Guidance, and Promotion Fair - followed by 749 participants.

c. "Industry and Commerce Chamber" Guidance and Promotion Programs for Puny Economic Group

The main target to be achieved in these programs is functioning Industry and Commerce Chamber as a partner of Government in the promotion of regional entrepreneurs. In relation to the cooperation between Industry and Commerce Chamber and Regional Government, Governor's Instruction No 7 of 1981 was issued. All Bupatis in East Nusa Tenggara were instructed to realize immediately the formation of Kabupaten Industry and Commerce Chamber.

Up to the end of 1982, 12 Regional Representatives of Industry and Commerce Chamber were formed, and two of them (representing Southern Central Timor and Ende) had been legitimatized.

In spite of being relatively young, this institution has shown significant activities - participating actively in upgradings, consulting with Government about association formation and helping its members in any problems solution.

5. Regional Finance

Regional pure income of East Nusa Tenggara in 1978/1979 totalled Rp1,853,960,000, while the development budget Rp321,850,000. In 1979/1980, it was Rp2,022,238,000, while the development budget Rp308,000,000. In 1980/1981, it was Rp1,511,261,000, while the development budget Rp311,000,000. In 1981/1982, it became Rp2,634,365,000, while the development budget Rp643,885,000. In 1982/1983, it increased surprisingly to be Rp6,015,781,000, while the development budget was Rp767,868,000. See Table III - 17.

Regional development income deriving from Government aid shows an increase annually. In addition, the growth of Inpres-Aid for East Nusa Tenggara Province , as a source of Development Income, also increases annually. So does Regional Income and Expenditure Budget of East Nusa Tenggara Province.

Income budget (Provincial Inpres-Aid + Regional Pure Income) in 1978/1979 totalled Rp2,620,000,000, then increased to be Rp9,767,868,000 in 1982/1983. See Table III - 18 and III - 19.

Income deriving from regional tax in East Nusa Tenggara during the Five-Year Development II is specified as follows: in the budgetary year of 1974/1975, totalling:Rp16,434,733.91 (Household Tax) and Rp11,321,004.82 (Motor-Vehicle Duty); in 1975/1976, totalling:Rp23,979,149.50 (Household Tax), Rp21,002,124.50 (Motor-Vehicle Duty), Rp104,160,490.65 (Name Alteration Duty On Motor-Vehicle) and Rp12,553,959.07 (Regional Revenue Office); in 1976/1977, totalling:Rp29,511,279.25 (Household Tax), Rp36,410,607.75 (Motor-Vehicle Duty), Rp154,574,615.00 (Name Alternation Duty on Motor-Vehicle) and Rp11,492,096.37 (Regional Revenue Office); in 1977/1978, totalling:Rp42,572,798.00 (Household Tax), Rp48,011,296.00 (Motor-Vehicle Du-

Tabel / *Table Table III — 16*

PERKEMBANGAN EKSPOR DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1978 - 1982 PER KOMODITI
THE GROWTH OF EAST NUSA TENGGARA EXPORT IN THE PERIOD OF 1978 - 1982 PER COMMODITY

(Volume dalam ton Nilai dalam US $)
(in tons volume and US$ value)

Komoditi Ekspor *Export Commodity*	1978				1979				1980				1981				1982				Ket. ***Remarks***
	Volume ***Volume***	%K	Nilai ***Value***	%K	Volume ***Volume***	% K	Nilai ***Value***	% K	Volume ***Volume***	% K	Nilai ***Value***	% K	Volume ***Volume***	% K	Nilai ***Value***	% K	Volume ***Volume***	% K	Nilai ***Value***	% K	
1. Kopi/*Coffee*	1.780,00	–	3.459.666,00	–	3.579	101,06	11.670.120,00	237,00	2.672	–25,3	6.185.710,00	–43	1.880	–29,6	3.072.450,00	–50,3	2.637,25	40,2	3.950.850,00	28,5	% K = % kenaikkan % Increase
2. Minyak Cendana/ *Sandalwood Oil*	8,45	–	587.593,00	–	11,4	34,9	701.211,42	19,3	4,3	–62,2	249.474,77	–64,4	8,2	90,7	466.165,86	86,8	3,5	–57,3	205.467,51	–55,9	
3. Ampas Cendana/ *Sandalwood Waste*	710	–	94.530,56	–	455	–35,9	54.860,56	–41,9	375	–17,5	60.239,93	–9,8	300	–20	36.659,13	39,1	200	–33,3	30.375,06	–17,1	
4. Kayu Cendana/ *Sandalwood*	100	–	200.000,00	–	–	–	–	.	–	–	–	–	–	–	–	.	–	–		–	
5. Rumput Laut/ *Sea weed*	351,663	–	143.748,35	–	122.267	–	47.020,15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.203	–	14.081,00	–	
6. Ikan Laut/ *Marine Fishery*	–	–	–	–	1.331	–	459.993,60	–	11,392	755,9	3.937.075,20	755,9	8.753	–23,1	3.025.036,80	–23,2	17.614	101,2	6.087.398,40	101,2	
7. Kulit Mutiara/ *Pearl skin*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.643	–	20.983,63	–	–	–	–	–	
8. Perahu Layar/ *Sailing perahu*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	–	2.915,08	–	
9. Perahu Layar Motor *Motorized sailing perahu*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1.538,46	–	
Jumlah / Total	2.950,19	–	4.485.537,91	–	5.498,66	86,3	12.933.206,73	188,3	14.443,30	162,6	10.432.499,90	–19,3	10.953,84	24,16	6.621.295,42	–36,5	20.527,953	87,4	10.292.685,51	55,4	

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Nusa Tenggara Timur
Source : Trade and Commerce Office of East Nusa Tenggara Province.

pengeluaran berbagai hasil produksi rakyat dalam tahun 1981 mencapai jumlah 58.461 ton, ternak 41.443 ekor dan nener bandeng 6.567.726 ekor.

b. Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan Golongan Ekonomi Lemah, telah diadakan berbagai penataran dan konsultasi. Proyek ini merupakan usaha kerjasama antara Departemen Perdagangan dan Koperasi dengan Lembaga Managemen FKKH Undana, Kupang.

Jenis kegiatan pembinaan yang diselenggarakan selama tahun 1978 sampai dengan 1981 di beberapa daerah kabupaten meliputi: Penataran Pegel, Penataran Pengusaha Muda, Konsultasi dan Penyuluhan serta pekan Promosi dengan jumlah peserta tercatat 749 orang.

c. Program Bimbingan dan Pembinaan KADIN bagi Golongan Ekonomi Lemah

Sasaran utama yang dicapai dalam bidang ini adalah memfungsikan KADIN sebagai partner Pemerintah dalam rangka pembinaan pada para pengusaha di daerah. Dalam perkembangan kerjasama KADIN dengan Pemerintah Daerah telah dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 7 tahun 1981. Kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Timur diinstruksikan segera merealisir pembentukan KADIN Daerah Kabupaten.

Sampai akhir tahun 1982 telah terbentuk Perwakilan KADIN Daerah sebanyak 12 buah dan dua diantaranya telah diresmikan yaitu Perwakilan KADIN Daerah Timor Tengah Selatan dan Perwakilan KADIN Daerah Ende.

Walaupun relatif muda dalam usia, lembaga ini sudah menunjukkan aktivitas dengan turut secara aktif mengikuti Penataran, konsultasi dengan Pemerintah terhadap pembentukan assosiasi serta membantu anggotanya didalam pelbagai penyelesaian masalah.

Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1978/1979 sebesar Rp1.853.960.000,-, untuk anggaran pembangunan berjumlah Rp321.850.000,-. Dalam tahun 1979/1980 berjumlah Rp2.022.238.000,-. Untuk anggaran pembangunan sebesar Rp308.000.000,-. Kemudian dalam tahun 1980/1981 pendapatan daerah berjumlah Rp1.511.261.000,- dengan jumlah anggaran pembangunan Rp311.000.000,-. Dalam tahun 1981/1982 sebesar Rp2.634.365.000,-, dengan jumlah anggaran pembangunan Rp643.885.000,-. Sementara dalam tahun 1982/1983 jumlahnya meningkat pesat menjadi Rp6.015.781.000,- dengan jumlah anggaran pembangunan sebesar Rp767.868.000. Lihat Tabel III-17

Untuk pendapatan pembangunan daerah yang bersumber dari bantuan Pemerintah, tiap tahunnya memperlihatkan angka kenaikan. Perkembangan Inpres Dati I Nusa Tenggara Timur sebagai sumber Pendapatan Pembangunan yang termasuk APBD Dati I Nusa Tenggara Timur tiap tahunnya menunjukkan angka kenaikan.

Anggaran pendapatan (Inpres Dati I + PAD) dalam tahun 1978/1979 berjumlah Rp2.620.000.000,-. Kemudian meningkat dalam tahun 1982/1983 sejumlah Rp9.767.868.000,-. Untuk lebih terinci lihat tabel berikut. Lihat Tabel III-18. Tabel III — 19

Penerimaan pajak daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Pajak Rumah Tangga (PRT), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan dari Dinas Pendapatan Daerah (DPD) dari Pelita II adalah sebagai berikut: Dalam tahun anggaran 1974/1975 dari PRT diperoleh dana sebesar Rp16.434.733,91 dari PKB sebesar Rp11.321.004,82. Sedang dalam tahun 1975/1976 dari PRT diperoleh dana sebesar Rp23.979.149,50; dan dari DPD sebesar Rp12.553.959,07. Sedangkan tahun 1976/1977 dari PRT sebesar Rp29.511.279,25, dari PKB sebesar Rp36.410.607,75, BBNKB sebesar Rp154.574.615,00 dan dari DPD sebesar Rp11.492.096,37. Dalam tahun 1977/1978 dari PRT sebesar Rp42.572.798,00, dari PKB sebesar Rp48.011.296,00, dari BBNKB sebesar Rp155.276.085,15, sedang dari DPD sebesar Rp34.816.455,54. Kemudian dalam tahun 1978/79 sebesar Rp55.980.874,50 (PRT); sebesar Rp72.848.418,00 (PKB); sebesar Rp178.382.452,05 (BBNKB) dan sebesar Rp18.827.770,31 dari DPD. Lihat Tabel III-20

Tahun 1979/1980 sebesar Rp63.036.974,- (PRT), sebesar Rp88.533.140,75 untuk PKB, sebesar Rp181.929.964,76 untuk BBNKB dan sebesar Rp20.423.938,11 untuk DPD. Tahun 1980/1981 untuk PRT sebesar Rp42.771.726,-; PKB sebesar Rp209.515.789,50. Untuk BBNKB sebesar Rp286.345.812,50 dan untuk DPD mencapai sebesar Rp25.968.674,32. Sementara dalam tahun 1981/1982 untuk PRT sebesar

Tabel / *Table III — 17*

PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR REPELITA III (dalam ribuan rupiah)
THE GROWTH OF EAST NUSA TENGGARA PURE INCOME DURING FIVE—YEAR DEVELOPMENT III (in thousand rupiah)

No	Tahun Anggaran *Budgetary Year*	Jumlah *Total*	Jumlah untuk Anggaran Pembangunan *Total of the Development Budget*
1.	1978/1979	1.853.960,-	321.850,-
2.	1979/1980	2.022.238,-	308.000,-
3.	1980/1981	1.511.261,-	311.000,-
4.	1981/1982	2.634.365,-	643.885,-
5.	1982/1983	6.015.781,-	767.868,-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Source : Regional Income Office of East Nusa Tenggara Province.

Tabel / *Table III — 18*

PERKEMBANGAN INPRES DATI I NUSA TENGGARA TIMUR SELAMA REPELITA III (DALAM RIBUAN RUPIAH)
THE GROWTH OF INPRES—AID FOR EAST NUSA TENGGARA PROVINCE IN THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

Tahun *Year*	Anggaran Pendapatan *Income Budget*		Jumlah *Total*	Keterangan *Remarks*
	Inpres Dati I *Provincial Inpres-Aid*	P A D *Regional Pure Income*		
1978/1979	2.298.150,-	321.850,-	2.620.000,-	
1979/1980	2.542.000,-	308.000,-	2.850.000,-	
1980/1981	5.000.000,-	311.000,-	5.311.000,-	
1981/1982	7.500.000,-	643.885,-	8.143.885,-	
1982/1983	9.000.000,-	767.868,-	9.767.868,-	

Sumber : Biro Keuangan Sekwilda Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Source : Financial Bureau, Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province.

ty), rp155,276,085.15 (Name Alteration Duty on Motor-Vehicle) and Rp34,816,455.54 (Regional Revenue Office); and in 1978/1979, totalling:Rp55,980,874.50 (Household Tax), Rp72,848,418.00 (Motor-Vehicle Duty), Rp178,382,452.05 (Name Alteration Duty on Motor-Vehicle) and Rp18,827,770.31 (Regional Revenue Office). See Table III - 20.

Regional tax income in East Nusa Tenggara during the Five-Year Development III is specified as follows: in 1979/1980, totalling:Rp63,036,974 (Household Tax), Rp88,533,140.75 (Motor-Vehicle Duty), Rp181,929,964.76 (Name Alteration Duty on Motor-Vehicle) and Rp20,423,938.11 (Regional Revenue Office); in 1980/1981, totalling:Rp42,771,726 (Household Tax), Rp209,515,789.50 (Motor-Vehicle Duty), Rp286,345,812.50 (Name Alteration Duty on Motor-Vehicle) and Rp25,968,674.32 (Regional Revenue Office); in 1981/1982, totalling:Rp50,526,890 (Household Tax), Rp266,748,434.50 (Motor-Vehicle Duty), Rp489,949,202.00 (Name Alteration Duty on Motor-Vehicle) and Rp46,279,452.32 (Regional Revenue Office); and in 1982/1983, totalling:Rp52,191,579 (Hosehold Tax), Rp288,211,124.44 (Motor-Vehicle Duty), Rp602,511,105.50 (Name Alteration Duty on Motor-Vehicle) and Rp80,027,514.14 (Regional Revenue Income). See Table III - 21.

Financial Institutions

Banking institutions in East Nusa Tenggara hold an essential role in development realization. Besides as a centre of money supply., they function as a stabilizer of prices.

In a sophisticated society the dynamic functions of a banking institution are channelling credits, receiving public savings and promoting its customers actively.

The promotion of customers is very important, since the credits given have to be utilized properly, especially for the purpose of productive developments. In provincial level (Kupang), several existing banks include:

1. Indonesian Bank (Bank Indonesia)
2. State Commercial Bank (Bank Dagang Negara)
3. Indonesian People Bank (Bank Rakyat Indonesia)
4. 1946 Indonesian State Bank (Bank Negara Indonesia 1946)
5. Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah).

It is only the Indonesian People Bank that has representatives in 12 Kabupaten in East Nusa Tenggara. Even, it has had 62 branches spreading

Tabel / *Table III — 19*

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SETELAH PERUBAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN : 1978/1979 s/d 1982/1983
THE REGIONAL INCOME AND EXPENDITURE BUDGET OF EAST NUSA TENGGARA AFTER PROVINCIAL ALTERATION, THE BUDGETARY YEARS OF 1978/1979 THROUGH 1982/1983

Pendapatan/*Income* — Belanja/*Expenditure*

No	Tahun Anggaran *Budgetary Year*	Anggaran/*Budget* Rutin *Routine*	Anggaran/*Budget* Pembangunan *Development*	Jumlah Seluruhnya *The Who Total*	Anggaran/*Budget* Rutin *Routine*	Anggaran/*Budget* Pembangunan *Development*	Jumlah Seluruhnya *The Whole Total*
1.	0000/0000	16.137.581.516,64	3.288.742.233,36	19.426.323.750,-	15.875.731.386,-	3.550.592.364,-	19.426.323.750,-
2.	1979/1980	19.068.881.850,90	3.858.689.480,20	22.927.571.331,10	18.531.736.500,-	4.395.834.831,10	22.927.571.331,10
3.	1980/1981	24.679.025.167,74	7.569.868.040,26	32.248.893.208,-	23.988.900.000,-	8.259.993.208,-	32.248.893.208,-
4.	1981/1982	30.385.457.561,95	12.217.249.508,79	42.601.707.070,74	29.478.665.356,80	13.123.041.713,94	42.601.707.070,74
5.	1982/1983	36.865.582.584,73	14.935.852.415,27	51.801.435.000,-	35.333.163.000,-	16.468.272.000,-	51.801.435.000,-
	Jumlah / *Total*	127.135.528.681,96	41.870.401.677,88	169.005.930.359,84	123.208.196.242,80	45.797.734.117,04	169.005.930.359,84

Sumber : *Biro Keuangan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur*
Source : Regional Finance Bureau of East Nusa Tenggara Province.

Rp50.526.890,-; untuk PKB sebesar Rp266.748.434,50; untuk BBNKB sebesar Rp489.949.202,00 dan untuk DPD sebesar Rp46.279.452,32. Sedang dalam tahun 1982/1983 PRT sebesar Rp52.191.579,-. PKB sebesar Rp288.211.124,44, BBNKB sebesar Rp602.511.105,50 dan untuk DPD mencapai Rp80.027.514,14. Lihat Tabel III-21.

Lembaga Keuangan

Lembaga perbankan di Propinsi Nusa Tenggara Timur memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga perbankan disamping sebagai pusat uang (supply money), berperanan pula dalam menjaga kestabilan harga-harga.

Dalam masyarakat modern fungsi dinamis dari lembaga perbankan disamping menyalurkan kredit dan menampung tabungan masyarakat, lembaga tersebut juga aktif membina para nasabahnya.

Pembinaan terhadap para nasabah sangat penting terutama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan kredit perbankan terutama untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang produktif. Pada tingkat propinsi (Kupang) terdapat beberapa bank yaitu:

1. Bank Indonesia (B I)
2. Bank Dagang Negara (B D N)
3. Bank Rakyat Indonesia (B R I)
4. Bank Negara Indonesia 1946
5. Bank Pembangunan Daerah (B P D)

Hanya Bank Rakyat Indonesia, yang mempunyai cabang di 12 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur bahkan sudah mempunyai 62 buah BRI Unit Desa yang tersebar diseluruh Nusa Tenggara Timur, sedangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) hanya mempunyai cabang di Kabupaten Sikka, Ende, Belu. Lihat Tabel III-22.

Dari tahun 1978 sampai 1982 ada kenaikan pelayanan kredit oleh lembaga perbankan dan juga ada perkembangan jumlah nasabah. Terutama dengan makin berkembangnya pembukaan cabang-cabang bank sampai pada tingkat Kabupaten. Bahkan BRI sudah sampai pada tingkat Desa (BRI Unit Desa).

Disamping pelaksanaan fungsi perkreditan, lembaga-lembaga perbankan di Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan fungsi tabungan yaitu menampung tabungan dari masyarakat.

Perkembangan Tabungan umum di Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1978 tercatat sebesar Rp2.447.314.000,-, dalam tahun 1982 sudah meningkat menjadi Rp5.676.270.000,-. Demikian pula untuk Taska tahun 1978 baru sebesar Rp1.473.000,- meningkat menjadi Rp12.613.000,- dalam tahun 1982.

Untuk tabungan Umum dari tahun 1978 hingga tahun 1982 berjumlah Rp18.981.937.000,-, sementara untuk Taska sebesar Rp20.664.000,-. Jumlah tabungan secara keseluruhan baik Tabungan Umum, pramuka, pelajar, pegawai maupun Taska berjumlah Rp20.722.675.000,-. Lihat Tabel III-23.

Perusahaan Daerah

Usaha memfungsikan Perusahaan Daerah sebagai unit ekonomi dalam menunjang kehidupan dan perkembangan Daerah guna pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab telah dilakukan dalam Pelita II maupun dalam Pelita III. Usaha ini ialah

Tabel / *Table III — 20*

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SELAMA REPELITA II
THE GROWTH OF REGIONAL TAX INCOME DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT II

No. Urt	Tahun Anggaran *Budgetary Year*	Jenis Penerimaan / *Sort of Income (Rp)* P R T Rp *Household Tax*	P K B Rp *Motor-Vehicle Duty*	BBNKB Rp *Name Alteration Duty on Motor-Vehicle*	D P D Rp *Regional Revenue Office*
1.	1974/1975	16.434.733,91	11.321.004,82	58.231.405,06	
2.	1975/1976	23.979.149,50	21.002.124,50	104.160.490,65	12.553.959,07
3.	1976/1977	29.511.279,25	36.410.607,75	154.574.615,00	11.492.096,37
4.	1977/1978	42.572.798,00	48.011.296,00	155.276.085,15	34.816.455,54
5.	1978/1979	55.980.874,50	72.848.418,00	178.382.452,05	18.827.770,31

Sumber *Dispenda Dati I N T T*
Source : Regional Revenue Office of East Nusa Tenggara Province.

Tabel / *Table III — 21*

PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SELAMA REPELITA III
THE GROWTH OF REGIONAL TAX INCOME DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

No	Tahun Anggaran *Budgetary Year*	Jenis Penerimaan / *Sort of Income (Rp)* P R T Rp *Household Tax*	P K B Rp *Motor-Vehicle Duty*	BBNKB Rp *Name Alteration Duty on Motor-Vehicle*	D P D Rp *Regional Revenue Office*
1.	1979/1980	63.036.974,-	88.533.140,75	181.929.964,76	20.423.983,11
2.	1980/1981	42.771.726,-	209.515.789,50	286.345.812,50	25.968.674,32
3.	1981/1982	50.526.890,-	266.748.434,50	489.949.202,00	46.279.452,32
4.	1982/1983	52.191.579,-	288.211.124,44	602.511.105,50	80.027.514,14

Sumber : *Dipenda Dati I N T T*
Source : Regional Revenue Office of East Nusa Tenggara Province.

in rural areas in East Nusa Tenggara. The representatives of Regional Development Bank are only in Kabupaten Sikka, Ende and Belu. See Table III - 22.

From 1978 to 1982, the credits supplied by banking institutions showed an annual increase. So did the total of customers. This chiefly resulted from the opening of branch-banks in Kabupaten levels and rural areas (Indonesian People Bank of Rural Unit).

Further, banking institutions in East Nusa Tenggara also receive public savings. The total of General Savings in East Nusa Tenggara in 1978 was Rp2,447,314,000, while in 1982 increased to be Rp5,676,270,000. Periodic Insurance Savings in 1978 totalled Rp1,473,000, while in 1982 became Rp12,613,000.

In the period of 1978 through 1982, General Savings totalled Rp18,981,937,000, while Periodic Insurance Savings Rp20,664,000. Overally,

Tabel / *Table III — 22*

PERKEMBANGAN PENGELUARAN KREDIT SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1978 - 1982

THE GROWTH OF CREDITS ISSUE IN EAST NUSA TENGGARA IN THE PERIOD OF 1978 - 1982

(dalam jutaan rupiah / *in million rupiah*)

Tahun / *Year*	KIK *Small Investment Credit* Nasabah / *Customers*	KIK Jumlah Kredit (Rp.) / *Total of Credits (Rp)*	KMKP *Permanent Working Capital Credit* Nasabah / *Customers*	KMKP Jumlah Kredit (Rp.) / *Total of Credits (Rp)*	Jenis Umum lainnya (Rp.) / *Other General Sorts (Rp)*	Posisi Kredit perbankan (Rp.) / *banking Credits Position*
1. 1978	240	424	756	523	3.279	4.226
2. 1979	418	731	3.500	1.060	3.663	5.454
3. 1980	1.217	2.405	4.916	2.031	6.858	11.944
4. 1981	2.242	5.835	6.878	5.021	12.862	23.718
5. 1982	3.504	8.922	8.322	8.004	18.209	36.135
Jumlah / Total	7.621	18.317	24.372	16.639	44.871	80.827

Sumber : Laporan Perbankan / *Source : Banking Report.*

dengan menyertakan modal pada PT-PT Daerah.

Adapun perusahaan Daerah ataupun PT-PT Daerah yang penyertaan modalnya dari Pemerintah Daerah Propinsi sebagai berikut:

Perusahaan Daerah

Dasar pembentukan dengan Peraturan Daerah sehingga penguasaan dan pemilik langsung oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah yang ada sekarang PD Flobamor, dengan dasar hukum pembentukannya sesuai Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No 17 tahun 1981 dan telah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No 539.63 - 848 tanggal 29 Juni 1982, dengan Modal sesuai Peraturan Daerah sebesar Rp2.400.000.000,-.

Disamping itu Pemda Nusa Tenggara Timur dengan membentuk beberapa PT. Dasar pembentukan melalui pembuatan Akte Notaris sehingga penguasaan dan pemilikannya juga berdasarkan ketentuan dalam akte.

PT Daerah itu ialah PT Praja Bhakti, Akte Notaris No 44 tanggal 21 April 1973, dengan modal dasar penyertaan Rp2.000.000,-; PT Peldan, Akte Notaris No 46 tanggal 3 Mei 1973, Pembetulan No 194/1974 dengan Modal dasar penyertaan Rp1.000.000,-; PT Globamor, Akte Notaris No 21 tanggal 23 Agustus 1978, dengan Modal dasar Rp8.000.000,- dan PT Pembangunan Timur Raya Sejahtera, Akte Notaris No 35 tanggal 28 September 1978 dengan Modal dasar Rp9.000.000,-.

Bidang Usaha

a. Perusahaan Daerah (PD) Flobamor

Sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai upaya mengembangkan sumber penerimaan Daerah bukan pajak sebagaimana ditentukan pada pasal 50 ayat 1 Undang-undang No 5 tahun 1974, disamping itu sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan sektor modern seperti sektor Industri, Pertambangan, Perdagangan dan Jasa maka kegiatannya: Ikut mengambil dalam PT Semen Kupang sebagai pendiri dan pemilik; Pengadaan Hand Sprayer untuk Kabupaten Sikka sebanyak 500 buah; dan untuk pemupukan Modal Kerja dalam bulan Oktober 1982 diadakan kerja sama dengan PT Cempaka Putih mensuplai kerangka baja bagi SD Inpres di Kabupaten-kabupaten se Nusa Tenggara Timur.

b. PT - PT Daerah

Sebelum terbentuknya PD Flobamor terdapat 3 (tiga) buah PT Daerah yang sudah tidak aktif bekerja yaitu: PT Praja Bhakti, yang berusaha di bidang perdagangan dan pemborong; PT Peldan, yang berusaha di bidang pengangkutan laut dan EMKL, Serta PT Flobamor, yang bergerak di bidang Industri dan Pertambangan. PT Daerah yang pada saat ini masih aktif yaitu: PT Pembangunan Timur Raya Sejahtera, dengan bidang usaha pada Pemborongan, serta PT Suresti bidang usaha distribusi bahan bangunan.

Sampai dengan akhir tahun 1982 sebagai PT Daerah telah memenuhi kewajibannya dengan menyetor ke Kas Daerah. Lihat Tabel III-24.

the total of savings (General Savings, Indonesian Scout Savings, Students Savings, Employees Savings and Periodic Insurance Savings) reached Rp20,722,675,000. See Table III - 23.

Tabel / *Table III — 23*

PERKEMBANGAN TABANAS/TASKA DALAM WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1978 - 1982

THE GROWTH OF NATIONAL INSURANCE SAVINGS/PERIODIC INSURANCE SAVINGS IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE IN THE PERIOD OF THROUGH 1982

(dalam ribuan rupiah / *in thousand rupiah*)

No Tahun *Year*	Tabum *General Savings*	Tapram *Indonesian Scout Savings*	Tapel *Students Savings*	Tapeg *Employees Savings*	Taska *Periodic Insurance Savings*	Jumlah *Total*
1. 1978	2.447.314	Nihil	3.990	189.265	1.473	2.642.042,-
2. 1979	2.556.120	30	1.057	202.582	970	2.760.759,-
3. 1980	3.489.356	33	6.001	299.419	70	3.760.759,-
4. 1981	4.722.877	166	22.880	518.824	5.538	5.270.285,-
5. 1982	5.676.270	172	44.794	510.801	12.613	6.244.710,-
Jumlah/Total	18.981.937	401	78.722	1.720.891	20.664	20.722.675,-

Sumber : Laporan Perbankan / *Source : Banking Report*

Keterangan :

- *TABUM = Tabungan Umum*
- *TAPRAM = Tabungan Pramuka*
- *TAPEL = Tabungan Pelajar*
- *TAPEG = Tabungan Pegawai*

Regional Companies

Efforts of realizing regional companies as an economic support for the life and development of regional areas have been made in the Five-Year Development II and III. It was done by equipping these companies with capital.

Regional companies the capital of which was derived from Provincial Government is specified below:
PD Flobamor (Flobamor Regional Enterprise) - This company was established under East Nusa Tenggara Provincial Regulation No 17 of 1981 and legalized under Domestic Affairs Minister's Decree No 539.63 - 848 of June 29, 1982. The capital determined in the Provincial Regulation totalled Rp2,400,000,000. Since the establishment of this company was under Regional Regulation, the direct outhority and ownership was hald by Regional Government.

The establishment of limited liability companies by the Regional Government of East Nusa Tenggara was conducted by means of Notary's Acts. On this account, the authority and ownership relating to them were regulated in these Acts. They in clude: Praja Bhakti Ltd., Notary's Act No 44 of April 21, 1973, the basic capital equipped totalling Rp2,000,000 ; Peldan Ltd., Notary's Act No 46 of May 3, 1973, Correction No 194/1974, the basic capital equipped totalling Rp1,000,000 ; Flobamor Ltd., Notary's Act No 21 of August 23, 1978, the basic capital equipped totalling Rp8,000,000 ; and Pembangunan Timur Raya Sejahtera Ltd., Notary's Act No 35 of September 28, 1978, the basic capital totalling Rp9,000,000.

Business Field

a. PD Flobamor

The goal of establishing this enterprise was to develop the source of non-tax regional income as determined in Law No 5 of 1974, chapter 50, item 1. Besides, it was also to accelerate the development of such modern sectors as Industry, Mining, Trade and Service. Its activities include: participation in Kupang Cement Ltd. as founder and owner, equipping Kabupaten Sikka with 500 units of Hand Sprayer, and cooperation with Cempaka Putih ltd. in supplying steel skeleton to Inpres Primary Schools in East Nusa Tenggara districts. This cooperation was done in October 1982 and aimed at producing working capital.

b. Regional Limited Liability Companies

Prior to the existence of PD Flobamor, there were 3 inactive regional companies, ie Praja Bhakti Ltd. - engaged in trade and contract undertaking; Peldan Ltd. - engaged in marine transportation; and Flobamor Ltd. - angaged in industry and mining. Pembangunan Timur Raya Sejahtera Ltd. is still active up to now and engaged in contract undertaking, while Suresti Ltd. in building materials distribution.

Up to 1982, the two active regional companies fulfilled their obligations to Regional Treasury. See Table III - 24.

c. Perusahaan Daerah Kabupaten

Perusahaan Daerah Kabupaten tercatat 12 buah, yang masih aktif 10 buah dn 2 buah tidak aktif.
Dari 10 buah yang aktif kegiatan usaha adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah usahanya di bidang percetakan, dan 9 (sembilan) buah di bidang perdagangan umum dan kontraktor.

Usaha yang dilaksanakan dalam rangka reorganisasi dan gunsionalisasi Perusahaan Daerah Kabupaten dengan jalan mengadakan inventarisasi dan evaluasi terhadap kegiatan dan permasalahan.

Pertambangan Energi Dan Listrik

Potensi hasil tambang di Nusa Tenggara Timur cukup baik, mengingat bahan tambang di perut bumi cukup banyak. Ini disebabkan sebagian besar kepulauan. Dari barat dimulai dari pulau Komodo, Rinca, Flores, Adonara, Solor, Lembata dan Alor terletak memanjang Timur Barat dalam garis Circum Pasific. Yaitu barisan gunung-gunung berapi, dan justru pulau Lembata dalam barisan ini bercabang ke utara melalui pulau Batu Tara/Sulawesi, Philipina terus ke Jepang. Dari Lembata ke Timur, melalui kepulauan Alor, Wetar dan seterusnya. Garis cabang di Lembata inilah yang menjadi garis perpisahan walace. Sesuai dengan teori geologi, di daerah ini banyak terdapat bahan tambang. Terutama jenis-jenis logam berat seperti Biji besi, Timah hitam, Tembaga, Barit dan lain-lain. Pulau Timur dan Sumba terletak di luar garis tersebut dan termasuk "Non Volcanic Arc" (tidak bergunung api). Namun demikian penyebaran batuan di Pulau Timor, terdiri dari batuan baku, batuan volkanik Perm, batuan mezozoikom dan batuan volkanik tersier.

Penyebaran batuan Eosen lebih luas dari batuan oligosen. batuan Eosen dipegunungan Mollo terdiri dari Pengendapan konglo merat dasar dari hasil rombakan batuan komplek dasar antara lain kwarsa, radio larit, sekis dan batu gamping. Karena itu di Pulau Timor dan Sumba banyak dijumpai bahan tambang, batu gamping, tanah liat, gips dan mangaan.

Bahan-bahan tambang yang mempunyai prospek antara lain: Barium sulfat (Ba So 4), banyak terdapat di Lembata dan Manggarai. Kp-nya pernah dipegang oleh PT Sorontawaya, Jakarta. Diatomea di Soe, sebagai bahan untuk pembuatan bom TNT, campuran karet, karet busa, bahan keramik tahan api, bahan poles seperti braso, bahan pembuatan filter dan penyerap. **Mangaan** banyak terdapat di Manggarai dan di Kupang berupa mangaan Dioxyde murni (90%). Kegunaannya untuk batere kering, untuk campuran baja dan lain-lain. **Chromium,** terdapat di Atapupu. Tembaga dan Timah, terdapat di Lembata, Manggarai dan Timor (Atapupu). **Belerang,** terdapat di Flores (Maumere, Lembata) Alor, Pantar. **Pomoise,** terdapat di Ende (sangat banyak). Gunanya untuk bahan baku rumah untuk batu-batu ringan tahan api, untuk Filter pada sumber-sumber air, bronik dan lain-lain. **Besi,** di Riung, Sumba. **Pasir Besi** (Pasir Titon), terdapat di Ende, Flores Timur. **Batu Gamping,** terdapat di Timor, kwaliter sangat baik untuk semen portland dan bahan penting untuk mencuci biji-bijian uranium. **Tanah Liat,** terdapat di Pulau Timor.

Berdasarkan data permulaan Maret 1983 terdapat 22 (dua puluh dua) perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan, namun baru sampai taraf eksploitasi (lihat tabel). Yang sudah diusahakan (eksploitasi) ialah :

a. Mangaan di Manggarai (Kecamatan Reo) diusahakan oleh PT Aneka Tambang.
b. Biji besi di Riung Bajawa sementara dijajaki oleh Direktorat Meta Lurgi LIPI berdasarkan Surat Permintaan Gubernur kepada Bapak Presiden mengenai permintaan dana bantuan Presiden untuk pengolahan biji besi (Bap 054.3/260BE/NM/1982 tanggal 27 Maret 1982).
c. Batu gamping dan tanah liat (Clay) di Kupang (tenau) oleh PD Flobamor sebagai bahan baku pabrik semen Kupang.

Perkembangan Kelistrikan di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Sebagai realisasi pembangunan kelistrikan di daerah NTT, dalam Pelita III sudah 94 desa yang berlistrik. Sementara sebanyak 35 desa lainnya dalam penyelesaian. Dengan kata lain 7,5% dari jumlah desa di NTT sudah mendapat aliran listrik.

Pusat pembangkit listrik di propinsi NTT sebesar 42.852 megawatt, jaringan tegangan menengah 220 kms, jaringan tegangan rendah 313 kms, pembangunan 173 buah gardu dengan daya terpasang 15.540 Kva dengan dana pembangunan keseluruhan sebesar Rp8.668.915.639,- Dibandingkan prosentase kenaikan sistem kelistrikan di Nusa Tenggara Timur dari tahun 1978 hingga tahun 1983 Pusat pengembangan tenaga listrik naik sebesar 515%, jaringan tegangan menengah naik sebesar 283%, jaringan rendah naik 341%. Lihat Tabel III-25.

Tabel / *Table III — 24*

No Nama PT Daerah ***Name of Regional Limited Liability Company***	Penyetoran ***Money deposited to Regional Treasury***				Jumlah ***Total***
	78/79	79/80	80/81	81/82	
1. PT Pembangunan Timur Raya, Sejahtera/*Pembangunan Timur Raya Sejahtera Ltd.*	—	3.000.000	15.000.000	15.000.000	33.000.000
2. PT Suresti/*Suresti Ltd.*	—	—	—	3.000.000	3.000.000
Jumlah / *Total*	—	3.000.000	15.000.000	18.000.000	36.000.000

c. Regional Companies of Kabupaten

The recorded total of these companies is 12 and specified as follows: 10 active (1 engaged in printing undertaking, while the other 9 in general trade and contractor) and 2 inactive.

Efforts made in reorganizing and functioning Regional Companies of Kabupaten include inventory making and evaluation on activities and problems.

6. Mining, Energy and Electricity

Mine potency in East Nusa Tenggara is good enough, since its earth contains many mine materials. In fact most of the islands in this territory (Komodo, Rinca, Flores, Adonara, Solor, Lembata and Alor) stretch in the Circum Pacific line from east to west with a volcano range in them. Lembata Island in this line branches northwards passing Batu Tara Island / Sulawesi, Philippines and Japan. On the basis of geological theory, this area possesses a great deal of mine materials, especially the kinds of heavy metal such as Iron-ore, Lead, Copper, Barium, etc. Timor and Sumba islands extend outside the line and belong to Non-Volcanic Arc. Notwithstanding, Timor Island has such stones as perm volcanic stones, mezozoicom stones and tertiary volcanic stones.

The spread of Eosen stones is wider than that of Oligosen stones. Eosen stones in Mollo mountains consist of basic conglomerate sedimentation resulting from the demolition of such basic stones as quarts, radiolarit, sekis and limestone. On this account, materials like limestone, clay, gyps, manganese and mine materials can be found in Timor and Sumba islands.

Mine materials that have good prospect include: Barium Sulphate, mostly found in Lembata and Manggarai; Diatomea, used for the production of TNT bomb, rubber mixture, foam rubber, fire-proof ceramics, polish, filter and absorbent; Manganese, mostly found in Manggarai and Kupang in the form of Pure manganese-dioxide (90%), used for dry-battery, steel alloy, etc; Chromium, found in Atapupu; Copper and Tin, found in Lembata, Manggarai and Timor (Atapupu); Sulphur, found in Flores (Maumere, Lembata), Alor, Pantar; Pomoise, found in Ende (in a very great total), used as a principal material to make a house, fire-proof light stones, filter for water-source, bronic, etc; Iron, found in Riung, Sumba; Iron Sand, found in Ende, East Flores; Limestone, found in Timor, of very good quality to make Portland cement and as an essential substance for uranium-ore washing; Clay, found in Timor.

Based on the data of early March, 1983, there are 22 companies engaged in mining field. Yet, they are still on exploration phase. Below are the materials that have been exploited:

a. Manganese, in Manggarai (Sub-districtof Reo), exploited by Aneka Tambang Ltd.
b. Iron-ore, in Riung Bajawa, temporarily sounded by Directorate of Metallurgy of the Indonesian Science Institute under Governer's Letter to President No Bap 054.3/260/BE/NM/1982 of March 27, 1982 - concerning the request of iron-ore manufacturing.
c. Limestone and clay, in Kupang (Tenau), by PD Flobamor, as a principal material in Kupang cement factory.

The Growth of Electricity in East Nusa Tenggara Province

In realizing the development of electricity in East Nusa Tenggara areas, during the Five-Year Development III 94 villages were electrified, while the other 35 are still in process. In other words, 7.5% of the total of villages in East Nusa Tenggara have received electric currents.

Generating-station in East Nusa Tenggara Province has a capacity of 42,852 MW, medium voltage 220 kms, low voltage 313 kms, and 173 posts with a power of 15,540 Kva. These all costed Rp8,668,915,693. The growth of electrification in this province in the period of 1978 throug 1983 is specified as follows: generating-station increasing 515%, medium voltage increasing 283% and low voltage increasing 341%. See Table III - 25.

Tabel / *Table III — 25*

TARGET PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN DIP/PO DALAM PELITA III UNTUK PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
THE REALIZATION TARGET OF THE DEVELOPMENT FOR EAST NUSA TENGGARA PROVINCE DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

No.	Tahun Anggaran / *Budgetary Year*	Pembangkitan termasuk PLTD Desa (PLTD - MW) / *Generation, inclusive of Rural Diesel power Station (MW)*	Uraian / Fungsi / *Description-Function* — Distribusi Listrik termasuk Distribusi Desa / *Electric Distribution, inclusive of Rural Areas* — J T M (kms) / *Medium Voltage work (kms)*		GARDU (bh/kVA) / *Post (units/kVA)*		J T R (kms) / *Low Voltage Network (kms)*		S R (Sambungan) / *(connections)*		Jumlah Desa / *Total of Villages*		
			APBN	APLN	APBN	APLN	APBN	APLN	APBN	APLN	APBN	APLN	
1.	1979/1980	1,552	16,45	—	11/1028		16,39	—	—	—	—	—	
2.	1980/1981	—	15		17/1726		38	—	—	—	5	—	
3.	1981/1982	5,650	60,80		53/3536	—	92	—	—	—	21	—	
4.	1982/1983	7,350	49,20	10	26/2650	—	55	—	2000	—	10	—	
5.	1983/1984	28,300	28,50	40	34/3400	32/3200	56	56	—	—	12	9	Rencana
	Jumlah / *Total*	42,852	169,95	50	141/12340	32/3200	257,39	56	2000	—	48	9	

Sumber : Perum Listrik Negara Kupang / ***Source : State Electricity Corporation of Kupang.***

Pekerjaan Umum, Perhubungan, Telekomunikasi, Pos dan Giro

Sesuai dengan kondisi selama Pelita III, pembangunan jalan di Nusa Tenggara Timur masih digarap secara konvensional. Yaitu peningkatan jalan aspal dengan penetrasi ataupun menggunakan perkerasan sistem Telford/Macadam. Kenyataan yang menggembirakan, produk yang dicapai telah dapat mengimbangi permintaan akan jasa angkutan yang cukup besar. Dari tahun 1978 - 1983 program perbaikan dan rehabilitasi jalan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dengan kenaikan rata-rata 30% per tahunnya.

Perkembangan dana untuk menunjang perbaikan jalan/jembatan selama periode tersebut mencapai jumlah **Rp34.623.337.000,-**. Hasilnya sangat baik. Program inilah yang merupakan program paling menonjol, karena ditujukan untuk mempercepat serta memperluas jangkauan pelayanan dari ruas-ruas jalan yang menembus daerah terisolir. Dengan demikian di akhir tahun anggaran 1982/1983, jalan negara dan jalan propinsi yang rusak sudah dapat diatasi. Sebagai bahan perbandingan, pada tahun 1978 keadaan jalan negara yang beraspal lebih kurang 448,2 km. Di tahun 1983 jalan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 913 km. Lihat Tabel III-26.

Jumlah perusahaan Angkutan di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang melayani penumpang di Propinsi ini dari tahun ke tahun juga memperlihatkan kenaikan. Dalam tahun 1978 perusahaan Otobis (PO) 692 buah, sedangkan perusahaan Angkutan barang (PA) 543 buah. Kemudian dalam tahun 1979 meningkat menjadi 844 buah, sedang untk perusahaan angkutan barang 683 buah. Kemudian di tahun 1980 perusahaan otobis meningkat cukup banyak menjadi 1.052 buah. Sedangkan untuk perusahaan Angkutan barang 814 buah. Sementara dalam tahun 1981 sebanyak 1.370 perusahaan, untuk perusahaan angkutan barang 1.113 buah. Kenaikan jumlah perusahaan memperlihatkan angka yang menggembirakan di tahun 1982, dimana untuk perusahaan otobis mencapai 1.628 dan perusahaan angkutan barang 1.520 buah. Dari uraian tersebut nampak kenaikan rata-rata per tahun untuk perusahaan otobis 40,899%. Sedangkan untuk perusahaan angkutan barang 42,456%.

Sementara arus barang yang melalui jembatan timbang dalam tahun 1978 tercatat 77.670 ton. tahun 1979 sebanyak 45.147 ton, tahun 1980 sebesar 65.409 ton, tahun 1981 sebesar 46.120 ton dan dalam tahun 1982 mencapai 45.367 ton. Untuk memudahkan angkutan orang dan barang antar pulau di Nusa Tenggara Timur dibuka penyeberangan seperti; Larantuka (Flotim) — Waiwerang — Lewoleba (Lomblen); Balauring (Lembata) — Kabir (Pantara); Kabir—kalabahi (Alor); Moritain (Alor) — Atapupu (Timor); Tablolong (Timor) — Papela (Rote); Baa (Rote) — Seba (Sabu); Seba (Sabu) — Baing (Sumba); Waingapu (Sumba) — Aimera (Flores); Manoto (Timor) — Wonreli (Kisar).

Perkembangan jumlah perusahaan angkutan selama Pelita III ternyata mengalami kenaikan yang cukup membanggakan. Rata-rata kenaikannya per tahun untuk perusahaan otobis mencapai 40,899%, sedangkan perusahaan angkutan barang 42,456%. Melihat perhitungan perkembangan ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Darat telah mengambil langkah-langkah untuk membina perusahaan-perusahaan angkutan yang ada secara modern.

7. Public Works, Communication, Post and Telecommunications

During the Five-Year Development III roads development in East Nusa Tenggara was still carried out conventionally. Roads asphalting was done with penetration or by means of Telford / Macadam hardening-system. The rejoicing fact is that the acquired result have been proportional and in balance with the desired transportation service. In the period of 1978 to 1983, programs for the betterment and rehabilitation of roads showed a continuously increasing tendency, with the annual average increase of 30%.

The fund for the supporting of roads/bridges during the above-mentioned period reached a total of Rp34,623,337,000. These programs have been the outstanding ones, for they were aimed at accelerating and widening service reach, especially in isolated areas. At the end of the budgetary year of 1982/1983, state and provincial roads that were damaged were overcome. In 1978, asphalted state roads stretched along 448.2 km, while in 1983 became 913 km. *See Table III - 26.*

From year to year transportation companies in East Nusa Tenggara Province show increase in number. In 1978, bus companies amounted to 692, while goods-transporting companies 543. Then in 1979, the former became 844, while the latter 683. In 1980, the total was 1,052 and 814 respectively; in 1981, it was 1,370 and 1,113; and in 1982, it was 1,628 and 1,520 respectively. From this description it is discovered that the annual average increase of bus companies was 40.899%, while that of goods transporting companies 42.456%.

In 1978, goods passing the weigh-bridge totalled 77,670 tons, in 1979 45,147 tons, in 1980 65,409 tons, in 1981 46,120 tons and in 1982 45,367 tons. So as to make easy inter-island goods and human transportation in East Nusa Tenggara, the following crossings have been opened: Larantuka (East Flores) - Waiwerang - Lewoleba (Lomblen); Balauring (Lembata) - Kabir (Pantara); Kabirkalabahi (Alor); Moritain (Alor); Atapupu (Timor); Tablolong (Timor) - Papela (Rote); Baa (Rote) - Seba (Sabu); Seba (Sabu) - Baing (Sumba); Waingapu (Sumba) - Aimera (Flores); Manoto (Timor) - Wonreli (Kaisar).

In fact the growth of transportation companies during the Five-Year Development III showed a good increase. The annual average increase of bus companies was 40.899%, while that of goodstransporting companies 42.456%. On this account, Regional Government (through Land Comminication Office) take measures to promote and modernize the existing transportation companies.

It is indicated by the fact that transportation companies in East Nusa Tenggara are in general personal companies which have not been in the form of Corporate Body. Because of their weak position, they are compelled to compete with other companies that own new vehicles. Consequently, personal companies can no longer survive. On the basis of this unhappy situation, Government endeavour to promote transportation companies and encourage them to have Corporate Body.

Sea Communication

Activities in this sub-sector have not run well yet. The main cause is that the facilities of Tenau Harbour are still insufficient. What is more, this harbour is only specialized for ship weighing not more than 10,000 DWT. *See Table III - 27.*

Kenyataan menunjukkan bahwa sistem perusahaan angkutan di Nusa Tenggara Timur baik angkutan orang maupun barang pada umumnya masih merupakan perusahaan perorangan yang belum berbentuk Badan Usaha. Karena kedudukan dan posisinya begitu lemah, maka usaha untuk memperluas perusahaan terpaksa harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang umumnya memiliki kendaraan baru. Dengan demikian perusahaan perorangan tidak bisa bertahan lama. Untuk mengatasi hal tersebut, dan dalam rangka usaha pembinaan perusahaan angkutan, Pemerintah memberikan dorongan kepada para pengusaha agar perusahaan angkutan memiliki Badan Hukum.

Perhubungan Laut

Kegiatan sub sektor Perhubungan Laut belum berjalan secara lancar. Ini disebabkan fasilitas pelabuhan Tenau belum memadai, karena dermaga ini dikhususkan untuk sandar kapal yang berbobot tidak lebih dari 10.000 DWT. Lihat Tabel III-27.

Kunjungan kapal laut yang singgah di pelabuhan Tenau dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan. Dalam tahun 1978 sebanyak 412 kapal, tahun 1979 sebanyak 383, tahun 1980 sebanyak 692, tahun 1981 sebanyak 555 dan dalam tahun 1982 kunjungan kapal sebanyak 619 buah. Untuk kegiatan bongkar muat barang tahun 1978 sebesar 153.763 ton, tahun 1979 sebesar 172.521 ton, tahun 1980 sebesar 192.375 ton, tahun 1981 sebesar 185.656 ton dan dalam tahun 1982 sebesar 189.859 ton. Sedang penumpang yang turun naik dari pelabuhan tenau tahun 1978 sebanyak 2.193 orang, tahun 1979 : 2.754 orang, tahun 1980 : 5.243 orang, tahun 1981: 5.856 orang dan dalam tahun 1982 mencapai 6.714 orang.

Kemudian untuk memuat hewan urutan tahun-tahun yang serupa adalah 23,998 ekor, 27.411 ekor, 24.868 ekor, 18.381 ekor dan 20.297 ekor.

Masalah yang menonjol pada awal Pelita III di sektor Perhubungan Laut adalah minimnya armada pelayaran yang mampu melayani keperluan pelayaran dalam wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan kata lain masih sangat terbatasnya perusahaan-perusahaan pelayaran yang beroperasi di wilayah ini. Akibat daripada itu, maka pelayaran reguler juga belum terpenuhi.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Pemerintah Daerah terus berusaha meningkatkan pembangunan Perhubungan Laut. Kebijaksanaan pokok yang dilaksanakan meliputi mengembangkan dan membuka jaringan pelayaran laut sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk tujuan ini pemerintah telah menyusun suatu kebijaksanaan perhubungan, yaitu membina dan meningkatkan pelayaran perintis untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur secara rutin maupun regular secara bertahap.

Dewasa ini pelayaran diarahkan pada line Utara, menyinggahi Surabaya, Ujung Pandang, Reo, Maumere, Larantuka, Atapupu, Kupang dan line Selatan menyinggahi Kupang, Waingapu, Ende, Waikelo, Lembor dan bergabung dengan kapal-kapal yang lebih besar. Tujuan utama pelayaran perintis, membuka daerah-daerah pelabuhan perintis yang jarang disinggahi kapal-kapal Niaga Swasta serta merangsang pelayaran kapal-kapal Niaga Swasta, dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Hasil-hasil yang telah dicapai selama Pelita III memberikan gambaran yang menggembirakan. Dalam kurun waktu tersebut, telah dibangun 4 pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta kapasitas yang memadai. Pelabuhan Tenau dengan kapasitas dermaga panjang 23 meter, lebar 15 meter dengan dilengkapi fasilitas bongkar muat yang cukup. Pelabuhan Waingapu dengan kapasitas dermaga 20 meter, lebar 15 meter. Pelabuhan dengan kapasitas panjang 75 meter, lebar 13,5 meter dan Pelabuhan Kalabahi dengan kapasitas panjang 40 meter, lebar 5 meter.

Disamping pelabuhan-pelabuhan laut yang sudah dibangun, pemerintah juga masih berusaha untuk menambah pelabuhan lainnya yang saat ini masih dalam tahap pembangunannya, seperti pelabuhan Larantuka, Wini, Atapupu, Reo, Sabu dan Rote.

Kegiatan Yayasan UKA

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tenau dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam Yayasan Usaha Karya (UKA) sebanyak 437 orang. Buruh-buruh ini dibagi dalam 12 kelompok kerja. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari mereka diberikan fasilitas antar jemput. Untuk memudahkan akomodasi yang sedang direncanakan pembangunan kompleks perumahan buruh, dan kini dalam tahap pengadaan lokasi tanah.

Pihak yayasan juga memperhatikan kesejahteraan karyawan antara lain berupa; asuransi, pengobatan dan sebagainya.

Tabel / *Table III — 26*

PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DI NUSA TENGGARA TIMUR SELAMA REPELITA III
THE GROWTH OF ROADS CONDITION IN EAST NUSA TENGGARA DURING FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

No Jenis kualitas jalan ***The Kind of Road Quality***	1978 (Km)	1979 (Km)	1980 (Km)	1981 (Km)	1982 (km	1983 (Km)
1 Permukaan Jalan/: *Road surface*						
a Jalan Negara/*State Road*						
- Beraspal/*Asphalt*	448,2	605,5	630,4	636	640	913
- Krikil/Awcas/*Gravel*	321,9	246	329,6	373	380	178,3
- Tanah/*Paved ground*		265,8	157,3	108,3	97,3	26
b Jalan Propinsi/ *Provincial road*						
- Beraspal/*Asphalt*	108,3	132,8	150,2	163	174	194,4
- Krikil/Awcas/*Gravel*	426	463,9	500,9	582	653	968,15
- Tanah/*Paved ground*	1.218,95	1.156,55	1.102,15	1.008,15	926,25	590,25
2 Kondisi Jalan/ *Road condition*						
a Jalan Negara & Propinsi/ *State and Provincial Roads*						
- Mantap/*Good*	170	185	202	210	225	235
- Tidak Mantap/*Fair*	1.750	1.815	2.008	2.210	2.478	2.635
- Kritis/*Bad*	950	870	660	450	167	—
b Jalan Negara/ *State Road*						
- Baik/*Good*	292	302	507	603,5	688,6	714,6
- Sedang/*Fair*	340,7	375	390	358	377,4	359,3
- Rusak/*Bad*	484,6	440,3	220,3	155,8	51,3	43,4
c Jalan Propinsi/ *Provincial Road*						
- Baik/*Good*	74,5	83,5	105	432,7	626,5	745
- Sedang/*Fair*	316,7	336,3	469	578,3	818,3	875
- Rusak/*Bad*	1.362,05	1.333,45	1.179,25	742,25	308,45	133,25

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur
Source : Public Works Office of East Nusa Tenggara Province.

The total of ships visiting Tenau Harbour trends to increase annually. In 1978, it include 412 ships; in 1979 383; in 1980 692; in 1981 555; and in 1982 619 ships. Goods-loading/unloading activities in 1978 included 153,763 tons; in 1979 172,521; in 1980 192,375; in 1981 185,656; and in 1982 189,859 tons. Passengers in 1978 totalled 2,193 people; in 1979 2,754; in 1980 5,243; in 1981 5,856; and in 1982 6,714 people. The total of loaded animals for these years was 23,998; 27,411; 24,868; 18,381; and 20,987 respectively.

A striking problem of Sea Communication occuring in the early Five-Year Development III was the limited total of fleets in East Nusa Tenggara. In other words, naval companies operating in this territory was minimum in number. As a consequence, regular navigation was not implemented completely yet.

In relation to that Regional Government make continuous efforts to promote and enhance Sea Communication development. The main policy applied includes developing and opening seanavigation lines able to reach all parts of East Nusa Tenggara. In this case Government have gradually promoted and enhanced pioneering navigation for all East Nusa Tenggara areas, both routinely and regulary.

Nowadays navigation is directed to two lines, north and south. The former passes Surabaya, Ujung Pandang, Reo, Maumere, Larantuka, Atapupu and Kupang; while the latter Kupang, Waingapu, Ende, Waikelo, Lembor and then joins in bigger ships. The principal target of pioneering navigation is opening naval areas rarely visited by Private Commercial ships and also arousing Private Commercial navigation in such a way that it can support the local economic growth.

The achievements acquired in the Five-Year Development III show a satisfactory description. During this period, 4 sea-harbours with various facilities and sufficient capacities were built: Tenau Harbour, 23-meter-long and 15-meter-wide pier, sufficient loading-unloading facilities; Waingapu Harbour, 20-meter-long and 15-meter-wide pier; Harbour 75-meter-long and 13.5-meter-wide pier; and Kalabahi Harbour, 40-meter-long and 5-meter-wide pier.

In addition, Government still endeavour to and other harbours such as Larantuka Harbour, Wini Harbour, Atapupu Harbour, Reo Harbour, Sabu Harbour and Rote Harbour, which are at present in the construction phase.

Tabel / *Table III — 27*

PERKEMBANGAN KEGIATAN POS DAN GIRO SELAMA REPELITA III
THE GROWTH OF POST AND GIRO ACTIVITIES DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

(dalam ribuan rupiah) / *(in thousand rupiah)*

No Keterangan *Description*	1978	1979	1980	1981	1982
01. Penjualan benda pos/ *Sales of post matters*	Rp46.475	Rp62.990	Rp84.513	Rp104.521	Rp135.234
02. Omset Dinas Giro Cekpos *Postal giro flow*	Rp5.399.419	Rp6.949.745	Rp11.100.145	Rp13.924.856	Rp16.747.310
03. Wesel pos yang dikirim/ *Postal money-orders sent*	Rp659.752	Rp782.886	Rp1.046.295	Rp1.454.971	Rp1.756.919
04. Wesel pos yang dibayar (termasuk wesel luar negeri) *Postal money-orders paid (including from abroad)*	Rp334.895	Rp456.108	Rp597.459	Rp802.924	Rp992.960
05. Surat tercatat/terdaftar dikirim/ *Registered main sent*	49.709 bh	51.799 bh	52.727 bh	62.046 bh	66.965 bh
06. Surat tercatat/terdaftar diterima/ *Registered main received*	63.263 bh	64.493 bh	69.934 bh	80.663 bh	85.993 bh
07. Surat tercatat/terdaftar singgah passe/ *transit registered main*	—	28.149 bh	28.377 bh	31.711 bh	46.189 bh
08. Surat Kilat dikirim/ *Express main sent*	—	282.075 bh	319.882 bh	441.882 bh	351.835 bh
09. Surat Kilat diterima/ *Express main received*	—	221.042 bh	257.511 bh	350.456 bh	276.436 bh
10. Surat Kilat singgah/passe/ *Transit express main*	—	363.544 bh	322.135 bh	263.950 bh	355.773 bh
11. Surat Kilat Khusus dikirim/ *Special dispatch main sent*	—	5.225 bh	16.502 bh	25.024 bh	35.666 bh
12. Surat Kilat Khusus diterima/ *Special dispatch main received*	—	5.864 bh	17.485 bh	25.485 bh	30.970 bh
13. Paket Pos dikirim/ *Postal packages sent*	4.179 bh	3.524 bh	2.035 bh	2.289 bh	1.431 bh
14. Paket Pos diterima/ *Postal packages received*	13.145 bh	8.983 bh	9.381 bh	12.765 bh	10.851 bh

Sumber : Kantor Pos dan Giro di Kupang
Source : Post and Giro Office of Kupang

Perhubungan Udara

Perkembangan arus lalu lintas Angkutan Udara dari pelabuhan udara El Tari adalah sebagai berikut: Pesawat terbang datang dan berangkat dalam tahun 1977 sebanyak 2.981, tahun 1978 meningkat menjadi 3.410, tahun 1979 sebanyak 3.112, tahun 1980 sebanyak 3.125, tahun 1981 sebanyak 3.359 buah dan dalam tahun 1982 sebanyak 2.956.

Untuk cargo muat tahun 1977 sebanyak 140.571 kg, tahun 1978 sebanyak 155.146, tahun 1979 : 148.100, tahun 1980 : 263.963, tahun 1981 : 260.010 dan dalam tahun 1982 cargo muat mencapai 185.603. Lihat Tabel III-28.

Pelayanan hubungan udara belum menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur secara merata. Situasi demikian antara lain belum tersedianya lapangan udara, yang memenuhi persyaratan serta belum terpenuhinya fasilitas keselamatan penerbangan, meskipun penerbangan perintis sudah berjalan. Pada sisi lain, masih terbatasnya jumlah perusahaan-perusahaan penerbangan sehingga armada penerbangan untuk melayani jalur di daerah ini juga sangat minim.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam pembangunan Perhubungan Udara lebih diarahkan kepada pembenahan organisasi dan pengembangan penerbangan perintis, dengan sasaran dapat menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbangan di masa mendatang, beberapa program pokok telah disusun misalnya meningkatkan kemampuan landasan dan keselamatan penerbangan baik untuk penerbangan reguler maupun penerbangan perintis. Disamping itu pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan penerbangan reguler seperti Pelabuhan El Tari di Kupang, Mau Hau di Waingapu, Waioti di Maumere dan Tambolaka di Waibudak.

Pembangunan Pelabuhan Udara El Tari telah mampu menampung penerbangan jenis F 28. Suatu kemajuan awal yang akan terus dikembangkan sehingga nantinya Pelabuhan Udara El Tari dapat didarati oleh jenis pesawat DC 9.

UKA Foundation's Activities

Loading-unloading activities in Tenau Harbour are done by workers associated in Work Undertaking Foundation (UKA Foundation) - totalling 437 people. These workers are divided in 12 work groups. In carrying out daily duties, they are equipped with return-transportation facilities. In relation to accomodation, workers housing complex is at present being planned, and land location is being sought.

The foundation also pay attention to such welfare for workers as insurance, health-security, etc.

Air Communication

The following is the growth of air transportation traffic at El Tari Airport: incoming and outgoing airliners in 1977 totalled 2,981; in 1978 3,410; in 1979 3,112; in 1980 3,125; in 1981 3,359; and in 1982 2,956.

Loaded cargo in 1977 amounted to 140,571 kg; in 1978 155,146 kg; in 1979 148,100 kg; in 1980 263,963 kg; in 1981 260,010 kg; and in 1982 185,603 kg. See Table III - 28.

Tabel / *Table III — 28*

KEGIATAN BONGKAR MUAT MELALUI PELABUHAN TENAU (TAHUN 1978 - 1982)
UNLOADING ACTIVITIES VIA TENAU HARBOUR, 1978 - 1982

No.	Uraian *Subject.*	Satuan *Unit*	Bongkar *Unloading* Masuk *In*	Muat *Loading* Keluar *Out*
1.	Kapal/Ship	buah/unit	477	477
2.	Perahu/Perahu	buah/unit	1.805	1.805
3.	Penumpang/Passengers	orang/person	9.293	5.915
4.	Ternak/Cattle	Ekor/head	—	27.411
5.	Barang/Goods	Kg	160.474.064	36.142.642

Pembangunan lapangan terbang Perintis Ipi Ende, mengalami beberapa hambatan antara lain masalah pembebasan tanah. Hasil survei teknis Ditjen Perhubungan Udara menyimpulkan bahwa lapangan terbang Ipi Ende sulit dikembangkan untuk jenis F27 karena adanya bukit di salah satu ujung landasan. Untuk mengatasi kejenuhan arus penumpang, palayanan ke daerah ini ditempuh dengan meningkatkan frekuensi penerbangan Twin Otter. Untuk mengetahui perkembangan Pembangunan Pelabuhan Udara perintis dalam Pelita III.

Telekomunikasi, Pos dan Giro

Telekomunikasi, Pos dan Giro memegang peranan penting dalam mempercepat informasi pembangun'an. Baik dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun hubungan dengan daerah luar. Untuk itulah Pemerintah Daerah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan bidang Telekomunikasi, Pos dan Giro. Sejak tahun 1978 hingga tahun 1983 dibangun gedung kantor pos lengkap dengan meubelair dan perabotnya serta mengadakan sarana lain seperti: kendaraan dan bis surat pembantu.

Dalam tahun 1978—1979 dilakukan pembangunan 3 buah gedung kantor Pos dan Giro pembantu. Masing-masing di Lewoleba (Kab Flotim), Niki-niki (Kab NTT) dan Reo (Kab Manggarai) serta gedung kantor Pos dan Giro Besar di Ibukota Kupang. Selain itu juga pengadaan sebuah sepeda motor dan sebuah kendaraan roda empat untuk angkutan Pos.

Tahun 1979—1980 membangun gedung Kantor Pos dan Giro tambahan di sekitar kampus universitas Nusa Cendana yang direalisir dengan lokasi di Oupura lengkap dengan perabot kantor/meubelair. Yakni di Oinlasi Kab TTS berupa gedung pos pembantu dan di Soe (TTS) kantor Pos dan Giro.

Tahun 1980—1981 pembangunan tiga buah gedung kantor Pos dan Giro pembantu di Lela (Kab Sikka), Lewa (Kab Sumba Barat) dan di Larantuka (Kab Flotim). Untuk Larantuka karena gedung lama suddah tidak memenuhi syarat maka pembangunannya lengkap dengan meubelair dan perabot kantor. Sedang gedung kantor di Penfui lengkap dengan perabot kantornya. Disamping melanjutkan/menambah biaya pembangunan gedung kantor Pos dan Giro, melanjutkan/menambah biaya pembangunan gedung kantor Pos dan Giro Besar di Kupang dan pengadaan 3 buah sepeda motor.

Tahun 1981 - 1982 pembangunan dua buah gedung kantor pos pembantu lengkap dengan perabot kantor/mebeulair. Masing-masing di Camplong (Kab Kupang) dan di Mbay (Aesesa) Kab Ngada. Kemudian pembangunan gedung kantor Pos dan Giro di Ende berikut tambahan meubelair perabot kantor dan pengadaan lima buah bis surat pembantu.

Dalam tahun 1982 -1983 membangun empat buah gedung kantor Pos dan Giro Pembantu lengkap dengan meubelair/perabot kantornya. Masing-masing di Kapan (Kab TTS), Waitabula (Kab Sumba Barat), Detusoko (Kab Ende) dan Betun (Kab Belu). Pembebasan tanah untuk calon Kantor Pos dan Giro Pembantu. Masing-masing di Paga (Sika) Borong (Manggarai), Manangan (Flores), Melolo (Sumba Timur) dan di Blang merang (Alor).

Sementara perkembangan kegiatan Pos dan Giro juga memperlihatkan peningkatan. Penjualan benda pos dalam tahun 1978 sebesar Rp46.475.000,-. Tahun 1979 meningkat menjadi Rp62.990.000,-, tahun 1980 meningkat menjadi Rp84.513.000,-, tahun 1981 Rp104.521.000,- dan dalam tahun 1982 meningkat menjadi Rp135.234.000,-. Lihat Tabel III-29.

Telekomunikasi

Pengembangan dalam bidang ini memperlihatkan kemajuan, terutama telah berhasil merobah dari sistem manual menjadi sistem otomatis. Ini sangat membantu memperlancar hubungan dengan pihak luar. Percakapan langsung dengan berbagai kota baik dalam wilayah Nusa Tenggara Timur maupun dengan kota-kota di luar wilayah Nusa Tenggara Timur sudah dapat dilaksanakan. Dengan adanya telekomda, hubungan dengan kecamatan sudah dapat dilaksanakan. Pengiriman berita antara Propinsi dengan Kabupaten, rata-rata 1200 berita tiap bulan. Sedang antara Kupang dengan luar Propinsi rata-rata 200 berita tiap bulan.

Telekomunikasi berhasil meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dari jumlah 67 set pesawat tahun 1978 menjadi 132 set pesawat di akhir Pelita III. Sementara pemasangan pesawat SSB—CMX (Suwan) sudah merata di 12 Kabupaten.

Untuk pembangunan SKSD—Palapa di Nusa Tenggara Timur sudah dibangun 8 buah Stasiun Bumi Sedang (SBS) dan Stasiun Bumi Kecil (SBK). Masing-masing di SBS Kupang, SBS Waingapu, SBK Ende, SBK Maumere, SBK Larantuka, SBK Waibudak, SBK Kalabahi dan SBK Atambua.

Air Communication service has not reached all parts of East Nusa Tenggara yet. This is due to the fast that qualified airport and flight safety facilities are not available yet though pioneering flight has been done. Apart from that, the total of flight companies is so limited that fleet giving flight service in this territory is very minimum.

Governmental policy for Air Communication development is focussed on organization arrangement and the expansion of pioneering flight, so that the service can reach all parts of East Nusa Tenggara.

Concerning the enhancement of future flight service, some principal programs have been arranged (for instance by enhancing landing-strip potency and flight safety, both regular and pioneering flights). In addition, Government observe the development of regular flight at El Tari Airport (Kupang), Mau Hau Airport (Waingapu), Waioti Airport (Maumere) and Tambolaka Airport (Waibudak).

The development conducted at El Tari Airport has enabled it to receive the flight of F-28 kind. This progress will continuously be undertaken in such a way that El Tari Airport can later be landed by DC 9 Airliner.

The development of Ipi Ende Pioneering Airport undergoes a few obstacles, among others the case of land opening. The result of technical survey by the Directorate General of Air Communication concluded that Ipi Ende can hardly be developed for the flight of F-27, since one of its landing-strip corners is hilly. So as to prevent passengers from being bored, service to this area is done by means of Twin Otter the flight frequency of which is enhanced.

Telecommunications, Post and Giro

It is Telecommunications, Post and Giro that plays a very important role in accelerating the spreading of development information. On this account, Government pay much attention to the development of this field. In the period of 1978 through 1983, furnished post-offices (inclusive of equipment/furniture) were built and such other facilities as vehicles and auxiliary letter-boxes were equipped.

In 1978-1979, three auxiliary office buildings of Post and Giro were constructed in Lewoleba (East Flores District), Niki-niki (East Nusa Tenggara District) and Reo (Manggarai District), and a main office was built in Kupang. In addition, a motorcycle and a four-wheel vehicle for transporting postal things were supplied.

In 1979-1980, additional buildings of Post and Giro near the campus of Nusa Cendana University and in Oupura were constructed (complete with equipment/furniture), and auxiliary offices in Oinlasi (Southern Central Timor) and in Soe (Southern Central Timor) were supplied.

In 1980-1981, three auxiliary office buildings of Post and Giro were constructed in Lela (Kabupaten Sikka), Lewa (Kabupaten West Sumba) and Larantuka (Kabupaten East Flores) - complete with equipment/furniture. In addition, the construction of main Post and Giro office in Kupang was continued and three motorcycles were supplied.

In 1981-1982, two auxiliary office buildings of Post and Giro were constructed in Camplong (Kabupaten Kupang) and Mbay (Kabupaten Ngada) - complete with equipment and furniture. Besides, a furnished building was erected in Ende, and five letterboxes were equipped.

In 1982-1983, four auxiliary office buildings of Post and Giro (complete with equipment/furniture) were constructed in Kapan (Kabupaten Southern Central Timor), Waitabula (Kabupaten West Sumba), Detusoko (Kabupaten Ende) and Betun (Kabupaten Belu). Land opening for office buildings of Post and Giro was done in Paga (Sikka), Borong (Manggarai), Manangan (Flores), Melolo (East Sumba) and Blang Merang (Ulor) - auxiliary offices.

Meanwhile, the growth of Post and Giro activities show an increase annually. In 1978, postal things sold totalled Rp46,475,000; in 1979 Rp62,990,000; in 1980 Rp84,513,000; in 1981 Rp104,521,000; and in 1982 Rp135,234,000. See Table III - 29.

Telecommunications

The development of this sub-sector shows an advance, particularly due to the presence of automatic system which gives so much help in speeding up communication and contact with outer areas. Direct communication, both inter-region of East Nusa Tenggara and with cities outside this province, can be done well. By means of regional telecommunications, inter-kecamatan contact can be carried out. The sending of messages between province and kabupaten reaches an average of 1,200 per month, while that between Kupang and areas outside the province has an average total of 200 messages per month.

In 1978, telecommunications sub-sector had 67 instruments, while at the end of Five-Year Development III 132 instruments. The installation of SSB-CMX machine (Suwan) has been conducted equitably in 12 kabupaten.

In relation to the development of Palapa Domestic Satelite, 8 stations have been built - 2 Medium Stations in Kupang and Waingapu, and 6 Small Stations in Ende, Maumere, Larantuka, Waibudak, Kalabahi and Atambua.

Tabel / *Table III — 29*

PERKEMBANGAN ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA EL TARI SELAMA REPELITA III
THE GROWTH OF AIR TRANSPORTATION TRAFFIC AT EL TARI AIRPORT DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

No Arus Lalu Lintas Udara *Air Traffic*	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1. Pesawat datang/ *Aircrafts arrival*	2.981	3.410	3.112	3.125	3.359	2.956
2. Pesawat berangkat/ *Aircrafts departure*	2.982	3.407	3.112	3.125	3.362	2.954
3. Pax datang/ *Passengers arrival*	27.987	32.659	35.524	38.867	47.054	43.269
4. Pax berangkat/ *Passengers departure*	28.952	32.774	33.989	38.667	45.446	42.653
5. Pax Transit/ *Transit passengers*	697	1.423	11.224	18.864	25.969	18.346
6. Bagasi Bongkar/ *Luggage unloaded*	428.848	543.313	542.724	559.034	628.550	528.591
7. Bagasi Muat/*Luggage loaded*	367.144	401.239	590.258	783.459	990.556	658.810
8. Cargo Bongkar/ *Cargo unloaded*	290.597	227.885	343.192	368.639	375.820	166.861
09. Cargo Muat/*Cargo loaded*	140.571	155.146	148.100	263.963	260.010	185.603
10. Pos dan Paket/*Post bags:*						
a. Bongkar/*unloaded*	74.547	87.171	105.263	103.103	108.720	78.455
b. Muat/*loaded*	60.379	57.960	82.507	95.056	92.864	77.139

Sumber : *Kantor Wilayah Perhubungan Nusa Tenggara Timur.*
Source : Communication Office of East Nusa Tenggara.

8. Pariwisata

Bertitik tolak dari tujuan Kepariwisataan Nasional maupun kebijaksanaan pengembangan Kepariwisataan Regional, memasuki awal Pelita III pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Timur diarahkan dan bertujuan untuk:

a. mengembangkan obyek-obyek wisata supaya mempunyai daya tarik yang bervariasi.
b. memperbaiki mutu pelayanan.
c. memperkenalkan budaya bangsa.
d. mendorong peningkatan wisatawan asing maupun domestik.
e membuka lapangan kerja serta memberikan kesempatan kerja baru.
f. meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam tahun 1978 - 1982 urusan kepariwisataan di Nusa Tenggara Timur ditangani seluruhnya oleh Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Tingkat I.

Untuk pengembangan pariwisata Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan para wisata pada khususnya, selama tahun 1978 sampai dengan 1983 Badan Pengembangan Pariwisata Nusa Tenggara Timur telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

(1). Bidang Perusahaan Perjalanan dan Angkutan Wisata mengusahakan agar perusahaan-perusahaan perjalanan mendapat ijin usaha dari Direktur Jenderal Pariwisata.
(2). Mengikutsertakan pimpinan-pimpinan Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan untuk mengikuti Penataran Biro Perjalanan di Denpasar.
(3). Bidang akomodasi dan fasilitas wisata lainnya:
  a. Mengadakan inventarisasi Perusahaan Akomodasi (hotel/losmen/wisma dan restoran/rumah makan) dalam rangka pengurusan perijinan dan klasifikasi.
  b. Mengadakan penataran pemilik/manager hotel/losmen/wisma di Kupang dan di Detusoko di Kabupaten Ende.
  c. Mendorong pengusaha hotel/losmen/rumah makan, agar dapat menggunakan fasilitas kredit pemerintah (lewat Bank) guna perbaikan fisik bangunan maupun perlengkapannya.

Potensi pariwisata di propinsi "Cendana" ini sesungguhnya amat tinggi. Yang dipikirkan bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan lebih baik. Pada umumnya potensi wisata berupa atraksi alam seperti, Danau Tiga Warna Kelimutu di Ende, panorama yang indah serta atraksi budaya berupa kampung-kampung tradisional, benda-benda peninggalan purbakala, kesenian dan beberapa peristiwa budaya khusus. Pulau Flores memiliki potensi Taman Nasional Komodo dan Danau Tiga Warna Kelimutu.

Taman Nasional Komodo

Taman Nasional Komodo terletak diantara pulau Sumbawa dan Flores. Keistimewaannya disamping Taman Lautnya yang begitu indah, juga "Varunus Komodoensis" yang lebih terkenal sebagai Naga Komodo, semacam kadal raksasa yang panjangnya mencapai 3 meter.

8. Tourism

In the early Five-Year Development III the development of Tourism in East Nusa Tenggara was aimed at:

a. Intensifying tourism objects so as to gain more various attractiveness.
b. Bettering service quality.
c. Introducing national culture.
d. Stimulating foreign and domestic tourists.
e. Opening work field and giving new employment opportunities.
f. Enhancing people's income.

In the period of 1978-1982, all tourism affairs were completely handled by Provincial Tourism Development Board.

In developing East Nusa Tenggara tourism in general and tourists in particular, Tourism Development Board of East Nusa Tenggara Province took the following measures in the period of 1978 through 1983:

1. Giving business permits to travel companies.
2. Inviting heads of General Travel Bureaus and Travel Agencies to attend upgrading in Denpasar.
3. Promoting tourism accomodation and facilities:
  a. Inventory making for accomodation companies (hotel, inn, restaurant) in the case of permit arrangement and classification.
  b. Holding upgrading in Kupang and Detusoko (Ende) for owners/managers of hotels/inns.
  c. Arrousing businessmen of hotels/inns/restaurants in utilizing governmental credit facilities (via banks) in relation to the development of physical structure and equipment.

The potency of tourism in East Nusa Tenggara is indeed so great. The most essential thing to do is considering how to develop it. In general tourism potency is in the form of natural attractions such as Kelimutu Three-Colours Lake in Ende, beautiful panoramas and cultural attractiones (traditional campoongs), ancient things, arts and several special cultural events. It is Flores Island that has Komodo National Park and Kelimutu Three Colours Lake.

Komodo National Park

This park is located between Sumbawa and Flores. Its speciality is that it has a beautiful seascape and "Varunus Komodoensis" (gigantic lizard the length of which is approximately 3 meters). The areas of this national park can be be reached via Labuhan Bajo by the use of ferry or aircraft.

Three-Colours Lake

Kelimutu Three-Colours Lake lies between Ende and Maumere, Central Flores. The three colours meant here are dark red, greenish blue and blackish brown. By the local people, the dark red lake is called "Tiwu Ata Polo" (the lake of people having black magic; the greenish blue ad "Tiwu Nua

Untuk memasuki kawasan pulau ini, dapat ditempuh melalui Labuhan Bajo, menggunakan kapal penyeberangan (ferry), atau dengan pesawat udara.

Danau Tiga Warna

Danau Tiga Warna Kelimutu terletak di antara Ende dan Maumere di Flores Tengah. Masing-masing danau memiliki warna yang berbeda misalnya, merah tua, biru kehijauan dan coklat kehitaman. Oleh penduduk setempat danau berwarna merah disebut "Tiwu Ata Polo" (danau orang-orang yang mempunyai ilmu hitam/suanggi/bahasa lokal Nusa Tenggara Timur). Sedangkan danau yang berwarna biru kehijauan biasa disebut "Tiwu Nua Muri Koo Fai" (danau muda mudi). Sedangkan danau yang berwarna coklat kehitaman disebut "Tiwu Ata Mbupu" atau danau orang tua.

Ketiga danau ini letaknya berdekatan di puncak gunung Kelimutu. Tempat peninjauan tersedia di sisi kawah. Dari puncak Kelimutu kita dapat menikmati alam pegunungan, lembah-lembah dan perbukitan yang amat menarik.

Perburuan Ikan Paus

Atraksi menarik lainnya dapat kita nikmati di perairan Lamarera, Kabupaten Flores Timur. Di sana dilakukan perburuan Ikan Paus secara massal dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana.

Disamping obyek wisata seperti telah disebutkan di atas masih banyak lagi obyek-obyek wisata lainnya cukup menarik untuk dikunjungi.

Di pulau Sumba ada kontes naik kuda dalam suatu atraksi yang disebut "Pasola", dimana 2 kelompok yang berlawanan saling melempar lembing dalam keadaan kuda sedang berlari.

Alor dan Pantar terkenal dengan "Moko", genderang dari perunggu yang digunakan sebagai mahar/mas kawin oleh penduduk setempat.

Pulau Rote terkenal dengan alat musik tradisionalnya yang dinamakan "Sasando".

Obyek-obyek wisata di atas, kini sudah berkembang dan berbagai fasilitas telah pula tersedia, termasuk transportasi dan akomodasi di semua Kabupaten.

9. Transmigrasi

Dengan dikeluarkannya Keppres No 4 tahun 1986 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Sumba, Flores, Alor dan Timor di Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal Transmigrasi, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur telah mempersiapkan calon Transmigrasi sebanyak 50.000 KK.

Untuk menghadapi program Transmigrasi Tahun Anggaran 1986/1987 semula diprogramkan 2.000 KK, tetapi karena situasi moneter pada waktu itu oleh Departemen Transmigrasi diturunkan menjadi 200 KK, yang pelaksanaannya telah dikirimkan ke Propinsi Irian Jaya. Masing-masing di Arso II Jayapura 60 KK (278 jiwa) dan di Prafi Manokwari 140 KK (429 jiwa).

Berdasarkan pengalaman tahun 1986/1987, ternyata program transmigrasi merupakan program yang sangat cepat diserap dan dimengerti rakyat Nusa Tenggara Timur.

Untuk menghadapi program Transmigrasi di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 1987/1988 adalah sebagai berikut: (a) Transmigrai Umum 5.000 KK, (b) Transmigrasi Lokal 200 KK, (c) Pembangunan Gedung Asrama Transito Transmigrasi 1 (satu) unit dan (d) Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk melaksanakan program tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan seluruh jajarannya membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Transmigrasi di masing-masing Daerah Tingkat II.

Program Pengerahan Transmigran

Sebagaimana ditetapkan dalam program Departemen Transmigrasi 1986/1987, Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan target pemindahan transmigran sejumlah 200 KK ke lokasi pemukiman di Irian Jaya. Target tersebut dialokasikan ke Kabupaten daerah asal sebagai berikut: Kabupaten Sikka 140 KK; Kabupaten Flores Timur 50 KK; Kabupaten Ende 5 KK; Kabupaten Timor Tengah Selatan 5 KK.

Karena diperhitungkan 200 KK tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan tahun anggaran (September 1986). Maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur melalui surat nomor 478/236—1 KLH/86 tanggal 26 Mei 1986 telah mengajukan permohonan kepada Menteri Transmigrasi agar kepada Nusa Tenggara Timur diberikan target tambahan sejumlah 370 KK sehingga jumlah keseluruhan target 1986/1987 menjadi 570 KK.

Namun berdasarkan Surat Menteri Transmigrasi Nomor 201/M/VII/1986 tanggal 11 Juli 1986 bahwa karena tidak adanya ABT (Anggaran Biaya Tambahan) maka permohonan tersebut tidak dapat

Muri Koo Fai" (the lake of the young); and the blackish brown as "Tiwu Ata Mbupu" (the lake of the old).

The three lakes are located adjacently to each other in the peak of Mount Kelimutu. The viewing place is in crater side. From the peak of Mount Kelimutu, fascinating mountains, valleys and hills can be enjoyed.

Whales Hunting

Another interesting attraction that can be enjoyed in Lamarera Waters, Kabupaten East Flores is whaling on a massive scale by the use of very simple implements.

Besides the tourism objects described above, there are still many which are interesting to visit.

In Sumba Island horse contest in the form of attraction called "Pasola" (two opposing groups throwing the javelin to one another) can be enjoyed.

Alor and Pantar are famous for their "Moko" - bronze drum used by the local people as dowry.

Rote Island is populer for its "Sasando" - traditional musical instrument.

The above-mentioned tourism potency has nowadays been developed, and various facilities have been available, including transportation and accomodation in all kabupaten.

9. Transmigration

Under President's Decree No 4 of 1986 - concerning the Establishment of Sumba, Flores, Alor and Timor as Transmigration Area of Origin, Regional Government of East Nusa Tenggara Province prepared 50,000 families as the would-be transmigrants.

In 1986/1987, 2,000 families were programmed for transmigration. Yet, owing to monetary situation at that time Transmigration Department only realized 60 families (278 heads) in Arco II Jayapura and 140 families (429 heads) in Prafi Manokwari.

The fact of 1986/1987 indicates that transmigration is a program that can be accepted and understood quickly by East Nusa Tenggara people.

Transmigration program in East Nusa Tenggara Province for the budgetary year of 1987/1988 includes: a) General Transmigration - 5,000 families, b) Local Transmigration - 200 families, c) The Construction of Transit Dormitory Building of Transmigration - 1 unit, and d) the Construction of Transmigration Office Building of East Nusa Tenggara Province.

So as to make such a program come true, Regional Government of East Nusa Tenggara Province-form Coordination Teams of Transmigration Realization in all kabupaten.

Program for Transmigrants Summoning

The 1986/1987 program of Transmigration Departement established that East Nusa Tenggara Province was projected to transmigrate 200 families to resettlement locations in Irian Jaya. This target includes the following areas of origin: Kabupaten Sikka (140 families), Kabupaten East Flores (50 families), Kabupaten Ende (5 families) and Kabupaten Southern Central Timor (5 families).

Estimating that the 200 families could be realized in the middle of the budgetary year (September 1986), East Nusa Tenggara Governor then, under his letter No 478/236-1 KLH/86 of May 26, 1986, requested Transmigration Minister to add the target with 370 families so that the entire total became 570 families.

Transmigration Minister, however, under his letter No 201/M/VII/1986 of July 11, 1986, stated that the request could not be consented, for there was no Additional Cost Budget. In other words, transmigration target of East Nusa Tenggara for the budgetary year of 1986/1987 was only 200 families as projected.

The fund for the resettlement of the 200 families had been realized completely, and the last dispatch of transmigrants was implimented On September 20, 1986.

The coordination of transmigration performance in both provincial and kabupaten levels could so far run well. All offices involving in it have shown their activie participations according to their functions and duties.

10. Rural Cooperatives

In accordance with Inpres No 2 of 1978, programs for rural cooperatives development are integrated cross-sectoral programs. It is meant that the development in this field is an integral part of National Development, especially the development of rural economy.

dipenuhi, sehingga target pemindahan transmigrasi dari Nusa Tenggara Timur tahun angaran 1986/1987 tetap 200 KK.

Target pengerahan dana pemindahan transmigrasi sejumlah 200 KK telah dapat direalisir seluruhnya dengan pemberangkatan terakhir tanggal 20 September 1986.

Koordinasi pepyelenggaraan transmigrasi, baik di Tingkat I maupun di Tingkat II berjalan dengan baik. Semua Instansi yang terkait telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengerahan calon trasmigrasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahkan fungsi Kanwil Departemen Transmigrasi di Tingkat II dijalankan oleh Instansi-instansi yang terkait melalui Unit Kerja Pelaksana Operasional transmigrasi Nusa Tenggara Timur No Kep 03/DT—NTT/V/86 tanggal 20 Mei 1986.

Koperasi/KUD

Program pengembangan Koperasi Unit Desa sesuai Inpres No 2 tahun 1978 adalah program lintas sektoral yang terpadu. Program ini dimaksudkan untuk pengembangan KUD sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan perekonomian Desa.

Jumlah KUD yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum secara menyolok meningkat setiap tahunnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam tahun 1978 jumlah Koperasi/KUD baru mencapai 50 buah, diakhiri tahun 1982 menjadi 146 buah. Dalam tahun 1982 jangkauan pelayanan/anggota telah mencapai 589.876 jiwa, dibandingkan keadaan tahun 1978 yang hanya 3.772 jiwa.

Pertumbuhan Koperasi/KUD di Propinsi ini baik yang KUD maupun non—KUD serta yang berbadan hukum (BH) dan tidak berbadan hukum (BBH) dalam tahun 1978 tercatat 216 buah. Meningkat di tahun 1979 menjadi 307 buah. Kemudian dalam tahun '80 menjadi 366 buah, tahun 1981 sebanyak 409 buah. Sampai dengan tanggal 31 Desember 1982 sudah mencapai 417 buah. Lihat Tabel III-30.

Fungsi KUD adalah menyediakan/menyalurkan sarana produksi keperluan sehari-hari dan jasa-jasa. Perkembangan penyaluran Saprodi dalam tahun 1978/1979 untuk urea dan TSP sebanyak 217.478 ton. Dalam tahun 1979/1980 sebanyak 188.517 ton meningkat dalam tahun 1980/1981 menjadi 505.443 ton.

Kemudian dalam tahun 1981/1982 meningkat secara meyakinkan menjadi 1.944.108 ton. Sementara sampai dengan 31 Desember 1982 berjumlah 6.492.484 ton. Dalam tahun 1979/1980 penyaluran ditambah dengan obat-obatan 110 kg/ltr. Tahun 1980/1981 obat-obatan sebanyak 1.092 kg/ltyr dan tahun 1982/1983 sebanyak 17.684 kg/ltr obat-obatan. Lihat Tabel III-31.

The total of rural cooperatives (either with or without corporate body) in East Nusa Tenggara increases annually. In 1978, it was 50 units, while at the end of 1982 became 146 units. In 1982, the service reached 589,876 members, while in 1978 only 3,772 members.

The total of rural/non-rural cooperatives (with or without corporate body) in this province reached 216 units in 1978; in 1979 307 units; in 1980 366 units; in 1981 409 units; and in 1982 (up to December 31) 417 units. See Table III - 30.

Tabel / *Table III — 30*

PERTUMBUHAN KOPERASI/KUD SELAMA REPELITA III
DI NUSA TENGGARA TIMUR
THE GROWTH OF COOPERATIVES/RURAL COOPERATIVES IN EAST NUSA TENGGARA DURING FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

Tahun *Year*	Jumlah KUD *Total of Rural Cooperatives*		Jumlah Non-KUD *Total of Non-Rural Cooperatives*		Jumlah *Total*		Jumlah Seluruhnya *The Whole Total*
	BH *With Corporate Body*	BBH *Without Corporate Body*	BH *With Corporate Body*	BBH *Without Corporate Body*	BH *With Corporate Body*	BBH *Without Corporate Body*	
1978	21	25	128	42	149	67	216
1979	28	72	139	68	167	140	307
1980	33	91	140	102	173	193	366
1981	77	65	178	89	255	154	409
1982*	101	46	186	84	287	130	417

Sumber : Kantor Wilayah Koperasi Propinsi NTT.
* *Sampai dengan 31 Desember 1982*
Source : Cooperatives Office of East Nusa Tenggara Province.
Keterangan : BH = Badan Hukum BBH = Belum Berbadan Hukum.

The function of rural cooperatives is supplying/channelling production facilities and services for daily necessaries. The channelling of production facilities for manure and "TSP" in 1978/1979 totalled 217,478 tons; in 1979/1980 188,517 tons; and in 1980/1981 505,443 tons.. Then in 1981/1982 this total became 1,944,108 tons, and up to December 31, 1982 the noted total was 6,492,484 tons. In 1979/1980 the channelling also covered medicines totalling 110 kg/l; in 1980/1981 1,092 kg/l; and in 1982/1983 17,684 kg/l. See Table III - 31.

Tabel / *Table III — 31*

PERKEMBANGAN PENYALURAN SAPRODI SELAMA REPELITA III
DI NUSA TENGGARA TIMUR
THE GROWTH OF THE CHANNELLING OF PRODUCTION FACILITIES IN EAST NUSA TENGGARA DURING THE FIVE—YEAR DEVELOPMENT III

Tahun *Year*	Pupuk *Manure*	(Ton) *(tons)*	Jumlah *Total*	Obat-obatan (Kg/Ltr) *Medicines (kg/l)*
	Urea	TSP *(tons)*		
1978/1979	144.985	72.493	217.478	—
1979/1980	125.678	62.839	188.517	110
1980/1981	336.962	168.481	505.443	1.092
1981/1982	1.296.076	648.032	1.944.108	—
1982/1983×)	4.328.256	2.164.128	6.492.484	17.684

Sumber : Kantor Wilayah Koperasi Propinsi Nusa Tenggara Timur
×) Sampai dengan 31 Desember 1982
Cooperatives Office of East Nusa Tenggara Province.
x) Up to December 31, 1982

Pengadaan Pangan dan Palawija oleh KUD

Dalam rangka pengadaan stock nasional dan keperluan pasaran umum, melalui Lembaga KUD. Pemerintah Pusat melalui APBN telah membantu modal berupa Kredit Inpres. Demikian pula pengadaan kredit palawija untuk Koperasi/KUD dimulai tahun anggaran 1980/1981 dan menunjukkan hasil yang sangat positif. Dari sebelas buah KUD yang telah memanfaatkan kredit telah direalisir pembelian palawija sejumlah 1.047.824 kg. Sedangkan realisasi penjualan kepada DOLOG mencapai 1.038.224,4 kg.

Efforts of Supplying Foodstuff and Second-Crop by Rural Coperatives

In complementing the national stock and general needs for markets, Central Government have, by means of State Income and Expenditure Budget, aided rural cooperatives with capital in the form of Inpres-Credits. Second-crop credits were also coffered to cooperatives/rural cooperatives (beginning from the budgetary year of 1980/1981), and the result gained was very positive. Eleven units of rural cooperative have utilized the credits, while the realized purchase of second-crop amounted to 1,047,824 kg. Meanwhile, the realization of sale to DOLOG (Logistics Depot) totalled 1,038,224.4 kg.

Untuk lebih meningkatkan peranan Koperasi/KUD terutama dalam pengadaan pangan stock nasional, telah dibangun 70 Gudang Lantai Jemur dan Kios (GLK) yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur masing-masing:

1) K u p a n g	2 KUD dengan 2GLK
2) Timor Tengah Selatan	2 KUD dengan 4 GLK
3) Timor Tengah Utara	4 KUD dengan 4 GLK
4) B e l u	10 KUD dengan 10 GLK
5) A l o r	9 KUD dengan 9 GLK
6) Flores Timur	7 KUD dengan 7 GLK
7) Si k k a	7 KUD dengan 7 GLK
8) E n d e	2 KUD dengan 2 GLK
9) N g a d a	5 KUD dengan 5 GLK
10) Manggarai	17 KUD dengan 17 GLK
11) Sumba Timur	2 KUD dengan 2 GLK
12) Sumba Barat	1 KUD dengan 1 GLK

So as to enhance the role of cooperatives/rural cooperatives, particularly in the case of implementing foodstuff national stock, 70 units of Store-house and Stall have been built in East Nusa Tenggara and are specified as follows:

1. Kupang	*: 2 units for 2 rural cooperatives.*
2. Southern Central Timor	*: 4 units for 4 rural cooperatives.*
3. Northern Central Timor	*: 4 units for 4 rural cooperatives.*
4. Belu	*: 10 units for 10 rural cooperatives.*
5. Alor	*: 9 units for 9 rural cooperatives.*
6. East Flores	*: 7 units for 7 rural cooperatives.*
7. Sikka	*: 7 units for 7 rural cooperatives.*
8. Ende	*: 2 units for 2 rural cooperatives.*
9. Ngada	*: 5 units for 5 rural cooperatives.*
10. Manggarai	*: 17 units for 17 rural cooperatives.*
11. East Sumba	*: 2 units for 2 rural cooperatives.*
12. West Sumba	*: 1 units for 1 rural cooperative*

B A B / *CHAPTER IV*

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT

PEMBANGUNAN bidang sosial budaya di Propinsi Nusa Tenggara Timur secara umum dapat dikatakan berhasil dan meningkat. Kriteria keberhasilan pembangunan bidang sosial budaya di Propinsi ini diukur dari tingkat keberhasilan di bidang pendidikan, agama, sosial, perumahan rakyat dan air bersih yang merupakan keperluan pokok (Basic Needs) seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Peningkatan pengadaan prasarana dan sarana di bidang pendidikan telah dapat memperluas daya serap lembaga pendidikan dari 80,53% di tahun 1978/1979, menjadi 93,68% di tahun 1982/1983. Sekolah umum masih tetap dominan terhadap sekolah kejuruan. Tetapi selama Pelita III ternyata terus dibangun sekolah umum, sebab ternyata daya serap sekolah umum di Nusa Tenggara Timur belum memadai (untuk SMTP 64% dan untuk SMTA 38%).

Disamping itu untuk pengadaan tenaga pengajar kejuruan seperti pengajar matematika, pengajar olahraga, bahasa Inggris masih sangat minim, dimana perbandingannya (ratio) guru/kelas mencapai 1 : 1,03.

Sedang penataan kembali pemukiman penduduk daerah rawan/kritis dan bantuan yang diperlukan dalam Pelita III dari Pemerintah Pusat mencapai sebesar Rp7.767.530.000,- dan Pemerintah Daerah sebesar Rp61.500.000,- dan untuk bencana alam sebesar Rp1.576.125.000,-.

Sementara lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat serta cukup air bersih untuk warga masyarakat yang merupakan syarat mutlak dalam pembinaan kesehatan rakyat meningkat. Peningkatan sarana dan prasarana dengan dukungan dana yang memadai terus dilaksanakan. Karena dengan dana sebesar Rp1.002.453.700,- untuk sejumlah 3.848 buah rumah ternyata belum memadai. Mengingat sekitar 80% masyarakat Nusa Tenggara Timur, masih bermukim di desa-desa dan di daerah kritis air.

Selain itu penanganan masalah bencana alam di daerah ini diupayakan dengan mempergunakan metoda pendekatan antisipatif preventif, baik untuk skala Pemerintah maupun kemasyarakatan. Hal itu merupakan gagasan dasar kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam upaya menghadapi bencana alam.

Disamping itu tingkat partisipasi/peranserta kaum wanita dalam menunjang pembangunan di Nusa Tenggara Timur nampak semakin nyata. Ini disebabkan semakin meningkatnya pemahaman akan hak dan tanggung jawab di kalangan wanita, baik melalui pembinaan maupun kerjasama nyata dari berbagai organisasi pembina wanita.

Dalam uraian selanjutnya akan digambarkan perkembangan pembangunan sektor sosial budaya dalam proses pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Agama

Hasil registrasi penduduk tahun 1980 menyebutkan, 90% penduduk di Propinsi ini terdiri dari umat beragama (Penduduk tahun 1981 sebanyak 2.737.166 jiwa). Dengan komposisi Katholik 1.442.545 jiwa; Kristen/Protestan 789.428 jiwa, Islam 231.713 jiwa, Budha 379 jiwa dan Hindu 1.685 jiwa. Sementara banyaknya tempat ibadah dalam tahun 1981 untuk gereja Katholik 1884 buah (394 permanen, 1940 darurat), Gereja Protestan 2074 buah (480 permanen, 1594 darurat), mesjid 564 buah (363 permanen, 201 darurat) dan Pura sebanyak 8 buah (5 permanen, 3 darurat).

Pembangunan sarana dan prasarana beribadat di Nusa Tenggara Timur umumnya dibangun dengan swadaya umat masing-masing agama. Sedangkan gedung peribadatan yang bersifat darurat dalam tahun 1981 berkisar 77,39%. Rata-rata tiap gedung ibadah melayani umatnya dengan ratio perbandingan 1 gedung untuk 766 orang (gereja Katholik); 1 gedung untuk 381 orang (gereja protestan); 1 gedung untuk 411 orang (Mesjid/langgar) dan 1 gedung untuk 216 orang (Pura Hindu Dharma).

Guru Agama

Dalam bulan Januari tahun 1982 di Nusa Tenggara Timur diangkat sebanyak 343 guru agama Inpres, terdiri dari Katholik 171 orang; Kristen Protestan 114 orang dan guru agama Islam 58 orang. Namun keperluan akan tenaga guru agama tersebut masih sangat diperlukan, termasuk bantuan pembinaan bidang pendidikan agama.

DEVELOPMENT in the field of social and culture in East Nusa Tenggara in general is considered a success. The criterion used to measure such a success is by knowing the degree of achievements in the fields of education, religion, social, public housing and water source, which are the basic needs of the whole people in this province.

Improvement in the infrastructure and facilities of education has made the absorption rate of educational institutions increase - from 80.53% in 1978/1979 to 93.68% in 1982/1983. General schools still dominate over vocational schools. Nevertheless, the construction of general schools was still continued during the Five-Year Development III, for its absorption rate was considered insufficient - Junior High School 64% and Senior High School 38%.

The replenishment of vocational theachers of mathematics, sports and English is very minimal, for which the ratio of teacher and classroom reaches 1 : 1.03.

Resettlement of people from critical areas to better places in the Five-Year Development III costed Rp7,767,530,000 (Central Government's aid) and Rp61,500,000 (Regional Government), while aid for natural disaster totalled Rp1,576,125,000.

Healthy housing and environment with sufficient clean water is and absolute requirement in promoting public health.

The ehancement of facilities and infrastructures by adequate funds is continuously conducted. The fact is that the construction of 3,848 houses (by a fund totalling Rp1,002,453,700) is not enough yet, for about 80% of East Nusa Tenggara people still live in rural areas lacking of water.

The handling of natural disaster in this territory is done by applying a method of preventive and anticipative approach. It is a basic concept in preparing Regional Government in confronting natural disaster.

Participation of women in supporting the development in East Nusa Tenggara seems more vivid. It is due to the fact that they have been aware of themselves and their function in the development.

The following will describe the growth of social and cultural development in the Province of East Nusa Tenggara.

1. Religion

The result of people registration in 1980 stated that 90% of the people living in this province are religious people In 1981, population totalled 2,737,166 heads. The composition of religion adherents was as follows: Catholicism 1,442,545 peopele, Protestantism 789,428 people, Islam 231,713 peope, Budhism 379 people and Hinduism 1,685 people. Religious places in 1981 were specified: Chatolic churche 1884 units (394 permanent and 1940 temporary), Protestant church 2074 units (480 permanent and 201 temporary) and temple 8 units (5 permanent and 3 temporary).

The construction of religious buildings in East Nusa Tenggara in general are the result of self-efforts made by the followers themselves. Temporary buildings in 1981 had a percentage of 77.39%. The average ration of religious place and adherents is: 1 : 776 (Catholic church), 1 : 381 (Protestant church), 1 : 441 (mosque) and 1 : 216 (Hindhu Dharma temple).

Religion Teachers

In the month of January 1982, 343 religion teachers of Inpress were establhised: 171 teachers for Catholic, 114 techers for Protestant and 58 teachers for Islam.

Notwithstanding, this number is still insufficient and the need for more teachers should be implemented. Aid for the enhancement of religion teachers is still need, too.

Air for Religious Building

A fund of Regional Income and Expenditure Budget of 1978/1979 thorugh 1982/1983 used to aid religious places amounted to Rp39,000.000, with the following description: Rp17,550,000 for Catholic Rp13,150,000 for Protestant, Rp7,250,000 for Islam and Rp1,050,000 for Protestant, Rp7,250,000 for Islam and Rp1,050,000 for Hindu.

Religious buildings receiving fund aid deriving from State Income and expenditure Budget Include: 85 Catholic churches (rehabilitated), 41 Christian Protestant churches, 150 mosques and 8 temples (rehabilitated).
See Table IV-1.

Bantuan rumah ibadah

Dana yang berasal dari APBD tahun 1978/1979 hingga 1982/1983 yang digunakan untuk membantu rumah ibadah sebesar Rp39.000.000,-.
Dengan perincian untuk rumah ibadah Katholik Rp17.550.000,-; Kristen dan Protestan Rp13.150.000,-; Islam Rp7.250.000,- dan bantuan untuk rumah ibadah Hindu Dharma sebesar Rp1.050.000,-.

Tempat ibadah yang mendapat bantuan berdasarkan dana APBN adalah gereja Katholik, 85 direhabilitasi; Kristen Protestan 41 buah; Mesjid 150 buah dan 8 Pura direhabilitasi. Lihat Tabel IV-1.

Bantuan M T Q

Bantuan kepada MTQ/LPTQ/Da'wah (APBD) tahun 1978/1979 Rp3.000.000,-, tahun 1979/1980 Rp5.000.000,-, tahun 1980/1981 Rp8.000.000,-, tahun 1981/1982 Rp13.550.000,-, dan tahun 1982/1983 Rp17.000.000,-.

Bantuan ini tiap tahun diberikan dalam rangka diadakannya MTQ Tingkat Propinsi dengan mengikutsertakan para Qari/Qariah dewasa, anak-anak dan remaja dari masing-masing Kabupaten.

Bantuan kepada Pesparani (APBD).

Tahun 1978/1979 Rp5.500.000,-; tahun 1979/1980 Rp5.000.000,-, tahun 1980/1981 Rp7.000.000,-; tahun 1981/1982 Rp5.000.000,- dan tahun 1982/1983 Rp25.000.000,-.

Kegiatan paduan suara Gerejani untuk tahun 1982 bagi agama Katholik diadakan di setiap Keuskupan, sedangkan untuk golongan Kristen Protestan untuk tahun 1982 tidak diadakan di Kabupaten-kabupaten karena diadakan di Tingkat Propinsi untuk mengikuti lomba di tingkat Nasional.

Jemaah Haji

Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1982 jumlah jemaah haji mencapai 535 orang. Dalam tahun 1978 jemaah haji 176 orang, meninggal 2 orang. Tahun 1979, 46 haji, tahun 1980 112 orang meninggal 3, tahun 1981, 103, meninggal 2 orang dan tahun 1982 jumlah jemaah haji 98 orang yang meninggal seorang.

Dalam rangka pembinaan generasi muda di bidang keagamaan dari masing-masing agama dilakukan kegiatan sebagai berikut:

Generasi muda Katholik

- Penataran pembinaan generasi muda Katholik. Yang sudah ditatar 20 Paroki/Gereja, sedang yang masih akan ditatar 567 Paroki/Gereja yang tersebar di Nusa Tenggara Timur.
- Latihan ketrampilan:
  Diadakan 3 kali kegiatan dengan peserta masing-masing 20 orang, latihan berupa jahit-menjahit, memasak makanan bergizi, pertukangan kayu dan tukang batu. Juga diberikan pembinaan Iman ke-Katholikan.
- Apresiasi Budaya:
  Diadakan 3 kali kegiatan dengan diberikan sarana penunjang oleh Pemerintah seperti Piala, Bola kaki, Volley, Basket, Amplifire, Alat-alat musik, Gitar dan sebagainya.

Generasi muda Protestan

- Telah diadakan Penataran Pembina Generasi Muda Kristen Protestan (2×20 orang = 40 orang).
- Lokasi latihan ketrampilan dan lain-lain se Nusa Tenggara Timur 2074 buah.
- Hambatan yang dialami ialah bahwa para pembina/kader yang telah ditatar, tidak dapat meneruskan informasi yang telah diperoleh karena ketiadaannya biaya/fasilitas.

Generasi muda Islam

- Tujuan pembinaan adalah mengarahkan gairah dan aktivitas generasi muda Islam agar selaras dengan pembangunan melalui pendekatan pembinaan agama.
- Sasaran utama adalah generasi muda di lingkungan Mesjid (Remaja Mesjid).
- Penanganan yang telah dilakukan:
  a. Pembentukan Organisasi Remaja Mesjid (di Nusa Tenggara Timur sebanyak 564 Mesjid/Langgar), sudah terbentuk 71 Organisasi Remaja Mesjid.
  b. Penataran Pembina Generasi Muda Islam di Nusa Tenggara Timur 2 × 40 orang (tiap mesjid 1 orang).
  c. Latihan ketrampilan 2 × sebanyak 80 orang (tiap Mesjid 1 orang), ketrampilan beternak ayam dan jahit-menjahit.
  d. Bantuan sarana apresiasi budaya/seni sebanyak 12 kali. Bantuan diberikan kepada tiap-tiap organisasi Remaja Mesjid yang sudah ada.

Tabel / ***Table IV — 1***

BANTUAN APBD TINGKAT NUSA TENGGARA TIMUR UNTUK RUMAH IBADAH

AID DERIVING FROM REGIONAL INCOME AND EXPENDITURE BUDGET OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE FOR RELIGIOUS HOUSES

(Dalam ribuan Rupiah) / *(in thousand rupiah)*

Rumah Ibadah / *Religious HOuse*	Besarnya Bantuan/Tahun Anggaran / *Total of Aid/Budgetary Year* 78/79	79/80	80/81	81/82	82/83	Jumlah / *tal*
Katholik/*Catholic*	1.700	2.100	4.250	9.250	33.770	51.320
Kristen Protestan/*Protestants*	1.300	1.600	3.250	7.000	15.300	28.450
Islam/*Moslems*	900	1.100	2.250	3.000	55.300	62.550
Hindu Dharma/*Hinduists*	1004	200	250	500	1.000	2.050
Jumlah / *Total*	4.000	5.000	10.000	20.000	105.370	144.370

Sumber : *Laporan Gubernur KDH Tk I Nusa Tenggara Timur mengenai Pelaksanaan Tugas Pemda Tk I NTT Periode 1978 s/d 1983.*
Source : Governor's Report of East Nusa Tenggara Province about the realization of Regional Government's duties of 1978 through 1983.

Aid for Islam Quran Reading Competition

Aid for MTQ

Aid for MTQ; Islam's Quran Reading Competition, /LPTQ; Institute for Islamic Quran Reading,/Da'wah; Islamic Preaching Outeach, from APBD; Regional Income and Expenditure Budget, in 1979 totally Rp3,000,000,-; 1979/1980 Rp5,000,000,-' 1980/1981 Rp8,000,000,; 1981/1982 Rp13,550,000,- and 1982/1983 Rp17,000,000,-

This Aid is given every year, within the frame of carrying out MTQ provincial level, by entries of Qoris; male Quran readers and Qoriahs; female Quran readers, of adult age, children and adolescence from every district.

Aid for Pesparani :

Pesparani: Pesta Paduan Suara Rohani/Festival of Church-Choirs, of which the fund is from APBD; Regional Income and Expenditure Budget, in the amount as follows : 1978/1979 Rp5,500,000,-; 1979/1980 Rp5,000,000,-; 1980/1981 Rp7,000,000,-; 1981/1982 Rp5,000,000,- and 1982/1983 Rp25,000,000,- The activities of festival of church choirs for the Catholic's in 1982 are held in every bishoperic, while for the Protestat groups in 1982 are not held in the district level, but in the provincial level, in order to participate in the national level.

The Haj Pilgrimage

Since the year 1978 to 1982 the amount of haj pilgrimage has reached 535 persons. In 1978 the pilgrims area 176 persons, died 2 persons In 1979 haj pilgrimage departure 46 persons; 1980 the amount of 112 persons, of which 3 died, in 1981 the amount of 103 persons of which 2 died, while in 1982 the total pilgrim are 98 persons of which one died.

Within the frame of youth promoting in the field of religion, each religion does activities as follows :

The Catholic Young Generation

— Upgrading of Catholic Young Generation. Having been upgraded totally 20 churches/parishes, and still on the programme to be upgraded about 567 churches/parishes spreading all over the East Nusa Tenggara.
— Skilltraining : had been conducted three times with 20 participants each, training in sewing skills, cooking nutritious foods, carpentry and masonry. Also provided with Catholic faith promoting.
— Cultural appreciation : Has been held three times with supporting facilities from the government such as : cups, soccer balls, volley balls, amplifiers, music instruments, guitars etc.

The Protestants Young Generation

— Has been held upgrading for the Protestant Yough (2 x 20 members = 40 persons).

- *Halls/locations being used for the skill training and oter activities in all the area of the province of East Nusatenggara are totally 2074 locations.*
- *Obstacles faced are that those upgraded promoted area unable to pass on the information attained because of lack of funds and facilities.*

The Moslem Young Generation

- *The purpose of guidance and promoting to evoke the spirit and activities of the Moslem Young Generation to be commensurate with the development*

2. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Nusa Tenggara Timur tetap berpijak pada dasar yang telah diletakkan pada masa sebelumnya. Hanya diadakan beberapa modifikasi tertentu baik dalam hal, pendekatan maupun dalam hal operasionalnya. Terutama guna tetap merelevansikan output pendidikan terhadap keperluan masyarakat Disamping memberi jawab terhadap berbagai masalah faktual di bidang pendidikan yang berkembang kemudian di daerah ini.

a. Pendidikan Dasar

Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan yang dititikberatkan pada perluasan kesempatan belajar bagi kelompok usia sekolah (7 - 12 tahun), selain mencegah drop out di tingkat sekolah dasar sebelum mencapai kelas III sekolah dasar.

Pelaksanaan Inpres Sekolah Dasar yang ditunjang dana APBD maupun partisipasi masyarakat terlihat meningkat tiap tahunnya.

Dalam tahun 1978/1979 jumlah Sekolah Dasar baik negeri/Inpres maupun swasta berjumlah 2.506 buah. Tahun 1979/1980 meningkat menjadi 2.567 buah, dalam tahun 1980/1981 meningkat lagi menjadi 2.693 buah. Kemudian dalam tahun 1981/1982 menjadi 2.783 buah dan dalam tahun 1982/1983 sudah menjadi 3.085. Sementara dalam tahun 1974 jumlah Sekolah Dasar baru sejumlah 2.306 buah dengan jumlah murid 349.234 orang, guru SD 11.521 orang. Lihat Tabel IV—2

Dari uraian tabel tersebut nampak jumlah Sekolah Dasar Inpres yang di tahun 1979 sebanyak 360 unit dan di tahun 1983 meningkat menjadi 881 unit. Ini berarti terdapat kenaikan sejumlah 521 unit selama 3 tahun atau sekitar 245%.

Pengadaan dan penyaluran buku

Perluasan kesempatan belajar tidak terlepas pula kaitannya dengan pengadaan dan penyaluran buku. Sebab buku merupakan bagian tidak terpisahkan dengan proses mengajar. Penyaluran buku dalam tahun 1978/1979 sebanyak 249.800 buku, tahun 1979/1980 sebanyak 17.900 buku tahun 1980/1981 sebanyak 22.400 buku, tahun 1981/1982 sebanyak 39.300 buku dan dalam tahun 1982/1983 mencapai 608.400 buah buku. Lihat Tabel IV-3.

Sedang untuk jumlah tenaga pendidik Sekolah Dasar tahun 1978/1979 sebanyak 14.179; tahun 1979/1980 sebanyak 14.183; tahun 1980/1981 14.543; tahun 1981/1982 sebanyak 14.600 dan dalam tahun 1982/1983 sebanyak 17.354 tenaga pendidik. Lihat Tabel IV-4.

progress through religious guidance approach.

- *The main target is the young generation in the mosque's environment (Mosque's adolescence).*
- *Handling beeing taken :*

a. *Eastablishing of Mosque's adllescence organizations. (In East Nusatenggara the total amount are 564 mosques/smaller mosques), and as many as 71 mosque's youth organizations.*
b. *Upgrading of the Moslem Young Gneration promotors in East Nusatenggara 2 x 40 members (1 members from every mosque).*
c. *Skill training 2 x 40 members totally 80 members, (1 member from every mosque), skill in pultry and sewing.*
d. *Aid for the means of the cultural / art appreciation totally 12 times. The aids are given to the existing Mosque's Adolescence Organizations.*

2. Education

The development in the field of education in the province of East Nusatenggara is still based on the provision laid down years before. Only several of certain modifications have been done either in the manner of approachment or in its operational methods. Especially within the purpose to make the output of education relevant to the people's demands, besides to give answer to the various factual problems in the field of education, which will be developing in this area.

a. Basic Education

For the purpose of supporting the realization of educational programme, which is heavily stressed on the expansion of learning opportunity for the school age groups (7 - 12 years old), besides to prevent drop-outs from the elementary school before reaching the third from the elementary school.

The realization of INPRES (President Instruction) of Elementary School which is supported by APBD (Regional Income and Expenditure Budget) and the people's participation is clearly increasing annually.

In the year of 1978/1979 the total number of elementary schools eiter the state owned/INPRES or privat elementary schools are 2,506 schools. In 1979/1980 the figure increases to 2,567 schools, to be more increased in 1980/1981 to become 2,693 schools. In the 1981/1982 the number reaches 2,783 and in 1982/1983 the number reaches already 3,085 schools.

In 1974 the number of elementary schools were only 2,306 schools, with total number of pupils were 349,234 and teachers totally 11,521. See table IV–2.

Tabel / ***Table IV — 2***

JUMLAH SEKOLAH DASAR MENURUT STATUS SEJAK TAHUN 1978/1979 SAMPAI DENGAN TAHUN 1982/1983
TOTAL NUMBER OF ELEMENTARY SCHOOLS ACCORDING TO THE STATUS GIVEN, SINCE 1978/1979 TO 1982/1983

NOMOR	Kabupaten *District*	JUMLAH SEKOLAH DASAR / *TOTAL NUMBER OF ELEMENTARY SCHOOLS*																		
		1978/1979			1979/1980				1980/1981				1981/1982				1982/1983			
		Neg/Inp *State Owned*	Swasta *Private's*	Juml *Total*	Neg *State Owned*	Inp *Presidential Instruction*	Swt *Private's*	Juml *Total*	Neg *State Owned*	Inp *Presidential Instruction*	Swt *Private's*	Juml *Total*	Neg *State Owned*	Inp *Presidential Instruction*	Swt *Private's*	Juml *Total*	Neg *State Owned*	Inp *Presidential Instruction*	Swt *Private's*	Juml *Total*
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01.	Kupang	191	145	336	123	76	143	342	123	96	142	361	123	99	142	364	123	138	142	403
02.	T T S	140	142	282	102	38	141	281	102	57	141	300	102	63	141	306	102	96	141	339
03.	T T U	8	113	121	—	13	112	125	—	21	112	133	—	23	112	135	—	25	112	137
04	B e l u	4	138	142	2	17	139	158	2	30	139	171	2	30	139	171	2	55	139	196
05.	A l o r	40	84	124	40	7	85	132	40	8	84	132	40	18	84	142	40	26	84	150
06.	Flotim	70	163	233	38	33	160	231	38	37	161	236	38	50	161	248	38	68	160	266
07.	Sikka	53	143	196	27	26	143	196	27	41	143	211	27	43	143	213	27	57	143	227
08.	E n d e	60	158	218	30	29	157	216	30	31	157	218	30	45	156	231	30	73	156	259
09.	Ngada	57	125	182	24	44	125	193	24	46	125	195	24	73	125	222	24	86	125	235
10.	Manggarai	65	265	330	25	55	266	346	25	76	265	366	25	80	265	370	25	163	265	·453
11.	Sumba Timur	61	64	125	49	13	64	126	49	21	65	135	49	24	65	138	49	39	65	153
12.	Sumba Barat	66	151	217	61	9	151	221	61	23	151	235	61	31	151	243	61	55	151	267
	Jumlah / *Total*	815	1.691	2.506	521	360	1.686	2.567	521	487	1.685	2.693	521	579	1.684	2.783	521	881	1.683	3.085

*Catatan / **Note***
Sumber Data : Dinas P & K Tk I NTT
Source of Data : Education and Cultural Office of the Regional Administration of East Nusatenggara.
Dengan demikian perbandingan jumlah Sekolah Dasar INPRES, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta adalah sebagai berikut:
Therefore the comparison of the total number of INPRES Elementary Schools, The State's ELementary Schools and the private's Elementary Schools are as follows

1. *Sekolah Dasar Negeri 521 buah (17%)*
   The State's Elementary Schools : 521 schools (17%)
2. *Sekolah Dasar INPRES 881 buah (28%)*
   INPRES Elementary Schools : 881 schools (28%)
3. *Sekolah Dasar Swasta 1.683 buah (55%)*
   Private's Elementary Schools : 1,683 (55%)

Jumlah / ***Total*** = 3.085 buah

Tabel / *Table IV — 3*

PENGADAAN DAN PENYALURAN BUKU PAKET INPRES SEJAK TAHUN 1978/1979 SAMPAI DENGAN TAHUN 1982/1983
SUPPLY AND DISTRIBUTION OF INPRES BOOKS PACKAGE SINCE 1978/1979 TO 1982/1983

Tahun *Year*	JUMLAH UNTUK MASING-MASING JUDUL/JILID *TOTAL NUMBER OF BOOKS FOR EACH TITLE AND VOLUME*					
	Inpres Nomor *Presidential Instruction number*	Jumlah SD/ *Total Number of Elementary Schools*		Judul / Jilid *Title I & II*	Jumlah Buku *Total Volume Books*	Keterangan *Information Number of*
		Lama *Old*	Baru Unit I & II *New Unit I & II*			
1978/1979	6/1978	2.278	220**	100	249.800	* Inpres
1979/1980	12/1979	—	179	100	17.900	10/1973
1980/1981	6/1980	—	224	100	22.400	6/1974
1981/1982	5/1981	—	393	100	39.300	6/1975
1982/1983	4/1982	6.403	639	100	608.400	3/1976

Sumber Data Dinas P & K Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Source of Data of Education and Cultural Office of the Regional Administration of East Nusa Tenggara.

b. Pendidikan menengah/lanjutan

Pendidikan Menengah Umum di Nusa Tenggara Timur terdiri dari SMP, SMA, SMPP. Dalam tahun 1978 mencapai jumlah sebanyak 354 buah. Sedangkan sekolah menengah kejuruan sebanyak 148 buah. Dengan daya serap untuk SMTP 64% dan tingkat SMTA 38%. Sementara dalam tahun anggaran 1982/1983 dibangun 55 unit yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Penambahan ruang kelas baru mencapai sebanyak 109 buah dan pembangunan ruangan sebanyak 105 ruang. Penambahan ruang laboratorium IPA sebanyak 41 buah dan merehabilitasi gedung SMP 13 buah. Selain itu pengadaan alat kesenian/olahraga dan alat peraga matematika mencapai sejumlah 85 set. Dan mengadakan penataran bagi 61 guru IPA.

Pendidikan menengah kejuruan

Untuk meningkatkan daya serap di tingkat pendidikan menengah kejuruan dilakukan berbagai kegiatan pendukung seperti:

a). Rehabilitasi, pengembangan STM Negeri Kupang dengan luas bangunan seluruhnya 2.426 m². Diantaranya sebuah bangunan bertingkat seluas 140 m² lengkap dengan peralatannya.
b). Pembangunan gedung STM Ende lengkap dengan peralatan.
c). Rehabilitasi penambahan ruang kelas (praktek + teori) di SMEA negeri dan SMKK.
d). Pembangunan SKK Negeri di Soe yang merupakan salah satu diantara 2 lembaga serupa di Indonesia.
e). Pembangunan SGO di Kupang, pembangunan TKK Pembina di Kupang.
f). Penataran bagi 14.500 guru SD bidang studi IPS, IPA, PMP, Matematika, bahasa dan ketrampilan.
g). Pendistribusian buku pegangan murid dan guru serta koleksi perpustakaan bidang IPS, IPA, PMP, Matematika, bahasa dan ketrampilan sebanyak 545 judul dengan jumlah 1.598.156 buku.
h). Pembangunan gedung pusat kegiatan belajar (IRC) dan PF, SPC Negeri Ende, Waingapu dan Kupang.

Pendidikan non formal

Untuk menunjang pendidikan non formal, program dibuat dalam satu paket, dengan membentuk kelompok-kelompok. Disamping pencetakan 98.000 eksemplar buletin serta permassalan olahraga masyarakat dengan peserta 30.905 orang.

c. Pendidikan Tinggi

Di Nusa Tenggara Timur dewasa ini terdapat 5 Lembaga Pendidikan Tinggi, terdiri dari 1 Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri dan 4 Lembaga Pendidikan Tinggi yang dibina swasta. Tiga diantaranya merupakan Pendidikan Tinggi Keagamaan. Kelima Lembaga Pendidikan Tinggi itu adalah: Universitas Negeri Nusa Cendana, Universitas Katholik Widya Mandira, Universitas Artha Wacana, Universitas Flores dan Akademi Teknik Kupang.

Perkembangan jumlah mahasiswa Undana sejak tahun 1978 (Pelita II) sampai dengan tahun 1983 (Pelita III) sebagai berikut:
Dalam tahun 1978/1979 sebanyak 5.281 mahasiswa, tahun 1979/1980 sebanyak 4.059; tahun 1980/1981 sebanyak 5.098; tahun 1981/1982 sebanyak 5.092 dan dalam tahun 1982/1983 sebanyak 4.861 mahasiswa.

From the calculation of the table concerned it is clear that the amount of INPRES Elementary School which is in the year 1979 as many as 360 units and in the year 1983 increases to 881 units. This means there is and increase of 521 units during 3 years or 245%

Book Supply and Distribution

Expansion of learning opportunity cannot be separated from the supply and distribution of books, because books are not separated parts from the teaching process. The distribution of books in 1978/1979 are as much as 249,800 books, 1979/1980 totally 17,900 books, in 1980/1981 22,400 books, in 1981/1982 39,300 books and in 1982/1983 608,400 books.
See Table IV – 3

The number of teachers of the elementary schools in 1978/1979 were 14,179, in 1979/1980 totally 14,183, in 1980/1981 totally 14,543, in 1981/1982 totally 14,600, and in 1982/1983 totally 17,354 teachers.
See Table IV-4.

Tabel / *Table IV — 4*

JUMLAH TENAGA PENDIDIK SEKOLAH DASAR DI PROPINSI NTT SELAMA PELITA III
TOTAL NUMBER OF TEACHERS OF ELEMENTARY SCHOOLS IN THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA DURING PELITA III

No.	Tahun *Year*	*Total number of Elementary Schools*	Jumlah Ruang Belajar *Total number of Classrooms,*	Rombongan Belajar *Learning groups*	Jumlah Guru Seluruhnya *Total number of the teachers*
1.	1978/1979	2.506	11.413	14.776	14.179
2.	1979/1980	2.587	14.019	15.252	14.183
3.	1980/1981	2.693	14.496	15.898	14.543
4.	1981/1982	2.783	15.104	16.578	14.600
5.	1982/1983	3.085	16.974	17.706	17.354

Sumber Data Dinas P & K Tingkat I NTT
Source of Data of Education and Cultural Office of the Regional Administration of East Nusa Tenggara.

Therefore the comparison of the total number of INPRES Elementary Schools, The State's Elementary Schools and the private's Elementary are as follows :
1. The State's Elementary Schools : 521 Schools (17%)
2. INPRES Elementary Schools : 881 Schools (28%)
3. Private's Elementary Schools.: 1,683 (55%)
Total : 3.085 Schools.

b. Middle Education and its Continual Level.

The general middle education in East Nusa Tenggara consists of SMP: Yunior High School; SMA: Senior High School and SMPP : Agricultural Yunior High School. In the year of 1978 the number conveys 354 schools, while vocational middle shools totally 148 schools. With the absorption rate of 64% in the Yunior High School level and 38% of Snior High School level. In 1982/1983 had been constructed 55 units, spread throughout the whole sub-districts. Additional new classrooms reached 109 rooms and the rehabilitation of totally for 105 rooms. Additional of physical science laboratory totally 41 and rehabilitation of Yunior High School buildings totally 13 units. Beside that the supply of art/sport equipments and mathematical demonstration tools totally 85 sets. There were also upgrading for 61 physical / mathematical science trachers.

Vocational Middle Level of Education

To increase the absorption rate in the middle school level of vocational education, there had been done variousd supporting activities such as :

a. Rehabilitation and expansion of STM (Middle Technical School Kupang), with total area 2,426 m2, including 1 two-floor building of 140 m2 complte with its equipments.
b. Construction for additional classrooms for practice and theory learning at SMEA (Economic Senior High School), and SMKK (Household Management Middle School (Woman Work School).
d. Development of SKK (Household Management School) in upang, construction of TKK Pembina (Kidergarden Park) in Kupang.
f. Upgrading for 14,500 teachers of Elementary Schools in the field of Sosial Science (IPS), physical/mathematical science (IPA), state's management and ideology (PMP), matemathics, language and vocational skills.
g. Distribution of teachers mannual and pulpil's handbooks and library's collection in the field of social science, physical science, state's management an ideology, mathematics, language and vocational skills, totally 545 titles with the sum of 1,598,156 books.

d. Seni dan Budaya

Nusa Tenggara Timur selain wilayahnya terdiri dari banyak pulau, juta masyarakatnya merupakan himpunan dari berbagai kelompok ethnis yang ada dengan latar belakang sub kultur yang beranekaragam. Hal tersebut ikut memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional, dan oleh karenanya telah pula dicanangkan berbagai kebijaksaan yang diarahkan untuk menggali, memupuk, mengembangkan Seni dan Budaya yang pada gilirannya melestarikan seni, budaya rakyat NTT sebagai bagian dai budaya Nasional. Kebijakan utama yang ditampilkan yang berhubungan dengan aspek ini pada prinsipnya dapat dikategorikan ke dalam 3 hal pokok:

1. Upaya menggali, memupuk, mengembangkan seni dan budaya tradisional rakyat NTT untuk disumbangkan dalam rangka memperkaya kesenian dan kebudayaan Nasional.
2. Melestarikan seni dan budaya tradisional rakyat NTT terutama seni dan budaya yang hampir punah ditelan arus perkembangan zaman.
3. Mengembangkan seni dan budaya tradisional dalam rangka mendukung sektor pariwisata serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya dikembangkan dalam bentuk program pembinaan kesenian yang diwujudkan dalam bentuk (a) merangsang kegairahan berkarya dengan jalan mengadakan sayembara empat bidang karya seni, memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi tinggi dan memberikan kesempatan penciptaan karya seni baru. (b) membangkitkan serta meningkatkan apresiasi dan penghargaan seni oleh masyarakat terutama kalangan generasi muda dengan jalan menyebarluaskan karya-karya seni kepada masyakarat luas melalui kegiatan penyuluhan, pameran, peragaan, pegelaran dan diskusi dengan berbagai kegiatan pendidikan kesenian lainnya termasuk penyusunan konsep naskah kesenian daerah. (c) memperluas pandangan dan wawasan seni dengan jalan menyelenggarakan lomba seni, pertukaran duta seni antar daerah, regional maupun internasional. (d) meningkatkan daya cipta dan kreativitas seniman maupun organisasi profesi seniman dengan jalan pemberian ceramah, sarasehan, lokakarya dan penataran. (e) menambah volume atau frekuensi pementasan kesenian daerah di daerah-daerah guna membendung pengaruh kebudayaan asing yang bersifat negatif. (f) menggali, membina dan mengembangkan kesenian daerah yang bernilai luhur tetapi hampir punah. (g) mengembangkan partisipasi aktif dan positif dari pada lembaga organisasi, sanggar kesenian dan seniman, untuk terlibat dalam upaya menggali, memupuk, mengembangkan serta melestarikan kesenian daerah.

Kegiatan yang dilakukan untuk menopang program kesenian tersebut adalah : (a) membangun sebuah gedung pameran di Kupang, (b) menyelenggarakan pagelaran seni tari dan musik, (c) menyelenggarakan kegiatan sosio drama di daerah-daerah yang memiliki seni tradisional yang hampir punah, (d) menyelenggarakan festival dari rakyat, paduan suara, bina musik tingkat daerah, (e) mengikutsertakan tari rakyat, paduan suara dan bina musik pada festival tingkat Nasional, (f) dibentuk komisi peneliti dan penilai kesenian daerah untuk hubungan luar negeri, dan (g) melalui aparat teknis yang ada, dilaksanakan pembinaan terhadap aktifitas organisasi kesenian di daerah se Nusa Tenggara Timur.

Kebudayaan

Kegiatan utama yang patut diungkapkan untuk membina kebudayaan daerah adalah :

(a). melakukan penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Timur yang meliputi 6 judul yakni: sejarah daerah, adat istiadat daerah, seni musik/tarian daerah, permainan rakyat dan ceritera rakyat.

(b). melakukan perekaman, analisa dan penyusunan naskah tentang aspek kebudayaan yang meliputi sejarah pendidikan daerah, adat istiadat daerah, ceritera rakyat yang mengandung nilai Pancasila, pemukiman sebagai kesatuan ekosistem, arsitektur tradisional, pengaruh Pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan, upacara tradisional, permainan tradisional sebagai kegiatan sarialisasi, ungkapan tradisional sebagai sumber informasi kebudayaan daerah, perkampungan di kota sebagai wujud pola adaptasi, dan isi kelengkapan rumah tangga tradisional menurut tujuan, fungsi dan kegunaannya.

Pembinaan penghayatan aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diarahkan dan pembinaan budi luhur bangsa berdasarkan Norma-norma Pancasila dengan tidak mengandung maksud menjadikannya dalam bentuk agama baru. Pembinaan telah dilakukan pada penganut Marapu di Sumba dan Jingitiu di Sabu (keduanya belum diakui Negara).

h. Construction of building for the centre of learning activities (IRC) and PF, SPG Negeri : State owned Teacher School sat Ende, Waingapu and Kupang.

Non Formal Education

To support non formal education, the programme has been carried out in 1 package by forming groups. Besides it, there are the printing of 98,000 copies of bulletin and the programmes popularization of sport with total participants of 30,905 persons.

c. Higher Learning

In the province of East Nusa Tenggara nowadays there are 5 higher learning institutes consisting of 1 state's owned and 4 uner the private's management. There among them are religion education institutions. Those 5 institutions are : The State University of Nusa Cendana, Catholic University of Widya, University of Artha Wacana, University of Flores and Academy of Technique of Kupang.

The development of Undana studends since 1978 (Pelita II) to 1983 (Pelita III) were as follows : In the year of 1978/1979 totally 5,281 students, 1979/1980 totally 4,059, 1980/1981 totally 5,098, in 1981/1982 totally 5,092 and in 1982/1983 totally 4,861 students.

d. Art and Culture.

East Nusa Tenggara besides its region consists of many islands, also its society is a gathering of various ethnical groups with of many kinds of subcultural back ground. This condition is and enrichment to the treasury of national culture, and for this reason various kinds of policies have been taken to explore, foster and develop the art and culture and in its turn to preserve the art and culture of the people of Nusa Tenggara as a part of the national cultural property.

The main policy taken in connection with this aspect principally can be categorized into three main items :

1. *Endeavours to explore, foster and develop the traditional art and culture of the people of East Nusa Tenggara, to be contributed to the national art and culture enrichment.*
2. *To preserve the people's traditional art and culture of East Nusa Tenggara, especially those nearly extinct swallowed up by the time progress.*
3. *To develop the traditional art and culture within the frame of supporting tourism sector and to increase the people's income.*

Further, developed in the form of programmes of art being realized as : a) To stimulate the working spirit by holding competition programmes in 4 fields or art. to give prozes to those with high achievements and to give opportunity for the new artistic creations. b). To evoke and to increase the appreciation and respect of art by the people especially among the young generation through widely distribution of artworks to to the people by the activity of information, exhibition, performances, exposures and discussions, with several activities in art education including outlining the concept of regional art. c). Embroadment of the sight and scope of art by conducting art competitions, artists interchange among the regions, national or international. d). To increase creative capability of artists and art organizations by giving lectures, seminars, workshops and upgradings. e). To rise the volumes and frequences of local art in the region, to embank the negative foreign culture penetration. f). To explore, to develop and foster local art which is prosessing a noble value but is almost extinct. g). To develop active and positive participation of art institutes, art centres and artists, to be involved in the efforts of exploring, fostering and developing the local art and its preservation.

Activities taken to support such as art programme are : a. Construction of Exhibition Hall in Kupang; b) to hold dance and music shows, c) to hold shows of socio-drama in the area where the traditional art is almost extincht, d) to hold people's folk dance festivals, vocal groups and music guidances on regional level, e) to mobilize the folk dances, choirs and musics to participate in the national level, f) to from reasearch and evaluation committee for local art, for the purpose of international shows and g) ghrough the existing technical apparatus, to realize guidance for art organizations activities in the region of East Nusa Tenggara.

Culture.

The main activitiy worthy to be revealed for fostering local cultural life are as follows :

a) To carry out research and notation of local culture in the region of East Nusa Tenggara consisting of 6 titles : the regional history, the regional customs and traditions, the regional music/dances, the folk plays and the folk tales.

b) To record, to make analyses and to compose the manuscript about cultural aspects covering the subjects of the history of local educational system, local customs and traditions, the folktales which containing the value of Pancasila, inhabitation as a unit in ecosystem, tradional architecture, the effects of Pelita towards rural living, tradional ceremony, tra-

e. Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan

Walaupun dalam bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan belum banyak kegiatan yang patut ditonjolkan mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur, namun telah diupayakan peletakan dasar-dasar bagi pembinaan dan pengembangan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan.

Kegiatan utama yang dilakukan diarahkan untuk menanamkan kesadaran akan urgensi kontinuitas peradaban bangsa serta pemanfaatan bidang ini sebagai sumber informasi dan bukti sejarah. Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam hal ini Universitas Nusa Cendana di Kupang, telah dirumuskan sejumlah program berupa penggalian, pemeliharaan dengan pengembangan peninggalan kebudayaan bangsa di masa lampau yang bernilai seni budaya maupun bernilai sejarah perjuangan bangsa yang meliputi: Program pembinaan dan pengembangan museum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa kolektor swasta: Mengadakan penelitian sejarah budaya, penelitian sejarah dan purbakala; Mengadakan inventarisasi dan dokumentasi peninggalan/warisan sejarah dan purbakala; Meningkatkan kegiatan pelestarian lingkungan sosial budaya; Mengadakan pemugaran, pemeliharaan dan penyelamatan sejarah dan purbakala; Melakukan inventarisasi lanjutan jumlah penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, telah dilakukan beberapa kegiatan yakni: Pemugaran Kompleks Makam Kuno TaEbenu di Kupang; Pemugaran Rumah Bekas Tempat Pembuangan Bung Karno di Ende; Pemugaran Kompleks Megalitik dan Rumah Adat di Namata—Sabu; Melakukan pemeliharaan terhadap peninggalan Sejarah dan Purbakala sejumlah 35 buah situs. Membangun sebuah gedung Museum di Kupang; Pengadaan koleksi museum yang meliputi: Ethnografika, Historika, Archeologi dan referensi koleksi, melakukan survei koleksi dan dokumentasi data di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ngada, Manggarai dan Kabupaten Sumba Timur.

f. Pembinaan Generasi Muda dan Peranan Wanita

Pembinaan Generasi Muda dan Peranan Wanita di wilayah Nusa Tenggara Timur diarahkan agar tetap selaras dengan arah dan kebijaksanaan Pembangunan Nasional sebagaimana disyaratkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Relevansi pembinaan generasi muda dan peranan wanita di NTT dilihat dalam konteks struktur penduduk Nusa Tenggara Timur dimana ciri demografis yang nampak berdasarkan hasil sensus tahun 1980 ialah besarnya jumlah kelompok usia muda (14 tahun ke bawah berjumlah 42,3% dari seluruh penduduk Nusa Tenggara Timur) serta besarnya jumlah wanita melebihi jumlah kaum pria.

Ditinjau dari segi ketenagakerjaan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan, kedua komponen tersebut merupakan kekuatan yang sangat potensial yang harus dibina dan dikembangkan agar memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan kwatitas maupun kwalitas keikutsertaan didalam proses pembangunan Nasional pada umumnya, dan khususnya pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pembinaan Generasi Muda

Dengan tetap berlandaskan pada strategi pembinaan yakni kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dan terpadu, baik mengenai aparat, Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan, maupun Sistem Koordinasi Terpadu, Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda di Nusa Tenggara Timur telah dirumuskan dalam bentuk Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Tingkat Nasional.

Memperhatikan konteks tatanan penduduk Nusa Tenggara Timur bagi sumber daya alam, sebagian terbesar berada di pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Sehubungan dengan itu, sasaran utama pembinaan dan pengembangan adalah pemuda usia 15-30 tahun yang berada di pedesaan. Besarnya kelompok penduduk usia muda (42,3%) hasil sensus penduduk tahun 1980) selain dapat dilihat dari segi potensi ketenagakerjaan namun mempunyai kaitan yang erat dengan besar prosentase pertambahan Pasangan Usia Subur yang dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang sulit terkendali.

Pada sisi lain, generasi muda harus pula dilihat sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga dipandang sangat relevan dan urgen untuk membekali pemuda/generasi muda agar memiliki: kepemimpinan ketrampilan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, patriotisme dan idealisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Sehingga memungkinkan baginya

dional play as as sacralization activities, traditional expression as a source of local cultural information, urban quarters as a realization od and traditional house furniture according to the purpose, function and its usage.

Guidance and information on the Believe in One God is directed to the noble character of the nation on the basic norms of Pancasila without any attention to create a new religion. Guidance and information have been given to the Marapu community in Sumba and Jingitin in Sabu. Both are still not yet recognized by the state.

e. Museum, History and Archeology.

Although in the fields of museum, history and archeology not so many activities can be mentioned due to various limited conditions of the regional administration of the province of East Nusa Tenggara of the regional administration of the province of East Nusa Tenggara, yet it has been tried to settle the foundation for guidance and development of museum, history and archeological aspects.

The main activities done is directed to imprint awareness of the urgency of the continuity of national civilization, and the utilization of this field as the source of information and historical proofs. In this case, through cooperation with educational institutes ie. University of Nusa Cendana in Kupang, had been compsed some programmes in the form of exploration, preserving and the expanding of the ancient cultural inherintance in the past which are of cultural value and of the national historical value, covering: programmes in enhancement and improvement of museums of the province of East Nusa Tenggara and several private collectors; to make cultural-historical research, survey on history and archeology; to arrange an inventory and documentation of historic remains / ancient inheritances; to increase the activities of socialcultural environment preservation; to make rehabilitation, protection and safeguarding the historic and ancient properties; to make further inventories of the number of the community followers of the Believers in One God in the province.

In the period of 5 years various activities are done such as : Rehabilitation of the ancient cometery Ta Ebenu in Kupang; rehabilitation of the house once used as a place of exile for Sukarno; rehabilitation of megalitic complex and traditional houses in Namata Sabu; taking care of 35 sites of historical and ancient inheritance; constructin of 1 museum building in Kupang; supply of museum collection covering ethnographycs, historis, archeologic and collection reference; to make a survey of collection and data documentation in the district of Kupang, the district of south Timor Tengah, north Timor Tengah, Belu, Ngada, Manggarai and the district of Sumba Timur.

f. Promoting of Young Generation and the Role of Women

Promoting of young generation and the role of women in the province of East Nusa Tenggara is directed to be always in confirm with the policy and destination of national development as required by the Guidelines on the State policy. The relevance of promoting the young generation and the role of women in the East Nusa Tenggara to be seen in the context of the East Nusa Tenggara population structure where its demographics characters became obvious by the cencus of 1980 of 1980 i.e. the large total number of younger generation under the age of 14 years old and lesser are of the amount of 42.3% of the whole population of East Nusa Tenggara and the exceeding number of women greater than the male population.

To be viewed from the employment aspect in relationship to support the development activities, both these two factors are potential powers which ought to be improved and developed to a chieve capability to increase quantity and quality in participation in the process of national development in or the regional development in the province of East Nusa Tenggara.

Promoting of Young Generation

By maintaining the promoting strategy, i.e. the whole integrated national policy, either about the apparatus, the basic design of promoting and development, or the integrated Coordination System, promoting and development of young generation in the province of East Nusa Tenggara have been defined in the form of the Basic Design for Promoting and Development as the further formulation of the basic design of promoting and development of the young generation on the national level.

Observing the context of population structure in the province of East Nusa Tenggara from the point of view of natural resources, the most part of them are living in rural areas and earn their livings on agricultural fields. In connection with it, the main objectives of promoting and development are the young people between 15 - 30 years old who are living in the rural areas. The amount of young people (as mentioned in 1980 census as big as 42,3 %) besides to be seen from the working force potentiality yet are still in tight relation with the amount of percentage of growth of Fertile Age couples, which are able to accelerate the speedy number of total population which is difficult to control.

In the other side, the young generation ought to be seen as the forth bearers of the generation ideals so that it is considered to be relevant and urgent

dapat mengembangkan/meningkatkan kreativitas dan tanggungjawab untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan Nasional.

Peta kepemudaan di Nusa Tenggara Timur selain memberi gambaran sebagian besar bermukim di pedesaan dan umumnya belum terorganisir secara baik. Salah satu arah kebijaksanaan program pembinaan dan pengembangan generasi muda di wilayah ini adalah peningkatan fungsi dan peranan wadah pembinaan seperti: KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Perkumpulan Olah Raga, dan Kesenian, Kelompok minat dan kelompok kegiatan lainnya.

Pembinaan dan pengembangan generasi muda di wilayah ini tetap diletakkan dalam kerangka pembinaan yang terpadu. Baik melalui jalur pendidikan formal di sekolah-sekolah, jalur masyarakat maupun lingkungan keluarga. Terutama peranserta kaum wanita sebagai Ibu Rumah Tangga/pendidik anak maupun melalui kegiatan olah raga dan kesenian serta wadah di generasi muda dan di instansi yang terkait.

Kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 1978/1979 hingga 1982/1983 untuk menopang kebijaksanaan tersebut dengan jalan : (a) Dibentuk kelompok belajar usaha pemuda tingkat perintis sebanyak 994 orang, (b) Melatih pemuda tingkat pramuka sebanyak 408 orang, (c) Melatih pemuda tingkat penuntun 80 orang, (d) Melatih dan membentuk kelompok belajar usaha pemuda tingkat perintis 37 orang, (e) Melatih pendamping pemuda 181 orang, (f) Penataran P4 untuk tokoh organisasi pemuda, mahasiswa dan tokoh pemuda lainnya, (g) Memberikan ketrampilan tertentu seperti las karbit, perbengkelan, montir radio, peternakan ayam dan pertanian bagi 165 orang, (h) membentuk satuan tugas pemuda yang setiap saat memiliki kesiapan dalam rangka pengabdian masyarakat, seperti untuk penanggulangan bencana alam, (i) Melakukan pembinaan terhadap kelompok minat untuk 60 orang, (j) Pembinaan terhadap kelompok kerja produktif 20 orang, (k) Pembinaan pertukaran pemuda antar daerah maupun antar negara dan pembinaan kelompok Paskibrata 127 orang, (l) Menyelenggarakan festival pemuda di bidang olah raga dan kesenian diikuti 660 orang, (m) Pembinaan organisasi/wadah Pembinaan Pemuda yakni KNPI sebagai mekanisme sentral dengan dukungan Anggaran Pendapatan Daerah yang terus meningkat tiap tahunnya, dan (n) Membangun prasarana phisik yaitu 1 gedung Cadika di Kupang dan 1 di Maumere.

3. Olah Raga

Masyarakat Nusa Tenggara Timur cukup gandrung dengan kegiatan olah raga. Pengaruh gerakan dan kegiatan olah raga terhadap kehidupan sosial budaya dapat dirasakan sehari-hari di daerah ini. Dengan keterbatasan sarana olah raga yang ada di Nusa Tenggara Timur ternyata telah mampu menyumbangkan putra putrinya dalam memperkuat tim Nasional ke gelanggang Internasional dan regional seperti ASEAN.

Kebijaksanaan di bidang olah raga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTT yang berdasarkan pada : (a) peningkatan dan pengembanan program keolahragaan, (b) pengembangan dan peningkatan mutu serta jumlah ketenagaan, (c) peningkatan dan pengembangan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan keolahragaan, (e) peningkatan dan pengembangan daerah potensial.

Strategi pembinaan yang ditempuh adalah **peningkatan program:** olah raga Masal, olah raga Prestasi, olahraga Khusus, dan olah raga Tradisional.

Pengembangan program wilayah olah raga :

— Masal : - PORDATS, PORDAF, PORDAS.
- POR Desa.
- POR : SD, SMTP, SMTA.
- POR : Perguruan Tinggi.
- POR : BAPOR

— Prestasi : - El Tari Memorial Cup.
- Flobamor Cup

Peningkatan Ketenagaan :

— Pembinaan olah raga fungsional.
— Instruktur olah raga desa.
— Pelatih cabang olah raga.
— Pembinaan organisasi olah raga.
— Perwasitan.
— Medis.

Peningkatan dan Pengembangan :

— Pengelolaan organisasi olah raga.
— Pengelola pertandingan olah raga.
— Sistem informasi olah raga.

to provide them the young generation to have; leadership, skills, healthy figures and creative powers, patriotism and idealism, consciousness of the state and nation obligation, personality and noble behaviour. Doing so, it makes possible for them to develop and to increase their creativity and responsibility to be participating in the national development.

The chart on their young people in the East Nusa Tenggara besides showing the picture of their major position living in rural areas and in general not yet well organized. One of the point of the guidance policy of those young generation int he province of East Nusa Tenggara is to increase the function and role of the means of promoting such as : KNPI (National Committee of Indonesian Youth), Pramuka (Indonesian Boyscouts), Karang Taruna (Community Youth Centres), Sport Clubs, Art Clubs, Groups of Interest and other activity groups.

Promoting and development of the young generation in this region remain to be kept in the integrated framework, either through educational line in formal schools, social tracks or family circles. Especially the participating role of women as the family's mother or child educator, or even through sport and art activities, and means of the young generation themselves or in the related institutions.

*Activities being done since 1978/1979 to 1982/1983 to support the policy concerned by ways of : a) The establishment of youth pioneering group on learning efforts as many as 994 young people enrolled, b) to train the young people in boy-scouting as many as 408 persons, c) to train the young people in the instructor advanced level as many as 80 members, d) to train and to form the work learning group in the pioneering level as many as 37 persons, e) to train coleadership group as many as 181 members, f) P4 *Guide to Enlightment and Application of Pancasila- upgrading for youth organization leaders, students and other young generation figures, g) to educate in a certain skill such as : welding, automative engineering, radio service, poultry and agriculture for 165 members, h) to form task force units of young people which are ready and be prepared any time in relation to the social decication, such as in the natural disaster rescue, i) to make promoting on the group of interest for about 60 members, j) promoting of the productive working group, 20 members, k) promoting of youth interchange either regional or international and promoting the group of PASKIBRAKA - Group of Flag Hoister, i.e. 127 members, l) to arrange youth festivals in the field of sport and art with 660 members, m) promoting of the youth organizations i.e. KNPI as the central mechanism with the support of APBD - Regional Income and Expenditure Budget, which is increasing every year and n) consyruction of physical infrastructure in the form of Cadika building in Kupang and one other in Maumere.*

3. Sport

The people of East Nusa Tenggara are excited enough with sport activities. The influence of movements and activities on sport affecting the socio cultural life, can be felt in everyday life in this region. With such existing limited facilities on sport, the East Nusa Tenggara province virtually is able to contribute its young people in national sports team to join the international and regional events, such as Sea Games, Asian Games and so on.

The policy in sport fields has the purpose to increase the people's prosperity standard based on : a) acceleration and development of sport programmes, b) acceleration and development of quality and quantity of sport task-force, c) acceleration and development of effectiveness and efficiency of management system for sport, d) acceleration and development of potential areas.

Promoting strategy taken are : the programme's improvement such as : Mass sport, achievement sports, special sports and traditional sports.

Promoting of programmes of sport areas :

– Mass : PORDATS, PORDAF, PORDAS
Village POR
POR : Elementary Schools, Yunior High Schools, Senior High Schools.
Higher Learning POR
BAPOR POR

– Achievement : El Tari Memorial Cup

Improvement in Sport Task-Force.

– Promoting of Functional Sport
– Village Sport instructors
– Coach of Sport branches
– Promoting of Sport organizations
– Referee
– Medical sport

Acceleration and development of :

– Managing sport organization
– Managing sport events
– Sport information system

Peningkatan Kabupaten Potensial :

— Untuk 6 cabang olahraga prioritas.
— Pengenalan 3 cabang olahraga (Hockey, Sepatu Roda, Softball).
— Peningkatan mutu Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai sumber bibit olahragawan Nasional melalui cabang Atletik, Tinju dan Silat.

Program yang sudah dilaksanakan di bidang olah raga menyangkut bidang program dan kegiatan wilayah olahraga. Di bidang program melaksanakan dan mengawasi kegiatan olah raga Tradisional. Membina dan membimbing pelaksanaan kegiatan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi.

Kegiatan wilayah olahraga terdiri dari PORDAST (Pekan OLahraga Daratan Timur dan sekitarnya) termasuk Alor, berlangsung 3 tahun sekali.

— PORDAF (Pekan Olah Raga Daratan Flores) berlangsung 2 tahun sekali.
  PORDAS diadakan 2 tahun sekali untuk daratan Sumba.
— PORDES (Pekan Olah Raga Antar Desa) yaitu ditingkat kecamatan.
— POR—BAPOR, Pekan Olah Raga bagi pegawai Negeri dilaksanakan setempat.
— POR SD, SMTP, SMTA secara bertahap diadakan di tiap kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan scope Nasional.
— POR Perguruan Tinggi antar Perguruan Tinggi setempat.
— El tari Memorial Cup : Sepak bola antar bond kabupaten dilaksanakan 3 tahun sekali.
— Flobamor Cup : khusus untuk cabang bulutangkis antar kabupaten.

Pembinaan di bidang ketenagaan dilaksanakan melalui :

— Pembinaan olah raga fungsional di Dinas/Jawatan, desa, sekolah, Lembaga Pendidikan Menengah dan tinggi.
— Instruktur olah raga dalam 12 kabupaten.
— Pelatih 6 cabang olah raga prioritas dan cabang yang dikembangkan.
— Pembinaan organisasi olah raga.
— Perwasitan 6 cabang olah raga prioritas dan cabang yang dikembangkan.
— Kesehatan olah raga : Dokter olah raga, massage, test physinal Fitness.

Disamping itu peningkatan tenaga pengelola organisasi dan pertandingan olah raga untuk kelompok desa, klub, pengurus sasana dan perserikatan. Peningkatan sistim informasi dilakukan pula melalui media massa dan selebaran. Peningkatan 6 cabang olah raga prioritas melalui atletik, volley, tinju, bulutangkis, pencak silat dan sepak bola. Selain untuk olah raga kempo, renang, tenis meja, catur, bridge, tenis, yudo dan basket.

Untuk pengembangan dilakukan di bidang hokey, sofbal dan sepatu roda. Sedang untuk pembibitan Nasional adalah Atletik dan tinju.

Untuk olah raga massal yang dilakukan ialah : atletik, bola kaki, volley, basket, bulutangkis, renang, tenis, dan tenis meja.

Di bidang olah raga masyarakat : atletik, tinju, sepak bola, volley, bulutangkis, tenis meja, karate, kempo dan silat.

Untuk olah raga khusus : olah raga cacat, pemeliharaan kesegaran jasmani dan olah raga rekreasi.

Sedang olah raga tradisional yang dibina mencakup di 12 kabupaten. Masing-masing adalah : Kupang 6 jenis, TTS 5, TTU 3, Belu 5, Alor 5, Flotim 1, Sikka 5, Ende 7, Ngada 6, Manggarai 7, Sumba Timur 6 dan Sumba Barat 6 Jenis.

4. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan di Nusa Tenggara Timur diarahkan pada usaha perbaikan hygiene/sanitasi, peningkatan penyediaan air minum dan pemberantasan penyakit menular seperti muntah berak, TBC, Malaria serta penyakit yang ada hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi rakyat. Disamping itu penggalakan dana kesehatan rakyat sebagai perwujudan solidaritas masyarakat.

Penyuluhan kesehatan masyarakat

Kegiatan komunikasi dan informasi dengan upaya pendekatan massa dilakukan melalui siaran radio, pemutaran film keliling, media tradisional dan pameran, selain dengan kampanye kesehatan dan pendekatan kelompok. Sejak tahun 1978 hingga tahun 1983 telah dibentuk 12 daerah kerja intensif baru, serta tetap dilakukan pembinaan bagi 34 daerah kerja intensif lama. Sedang pembinaan tenaga kesehatan dan non kesehatan tahun 1978/1983 mencapai 155 tenaga, terdiri dari 100 tenaga kesehatan dan 55 tenaga non kesehatan.

G i z i

Usaha perbaikan gizi keluarga mencakup penanggulangan kurang kalori protein (KKP), defisiensi vitamin A dan anemia gizi besi meliputi 134 desa di dalam kurun waktu 5 tahun. Disamping usaha penang-

Promoting of Petential Districs.

– For 6 priority sport branches
– Introduction of three sport branches (hockey, rolling skates and soft ball)
– Improvement of the quality of the East Nusatenggara province as the national source of athletes in the branches of athletic, boxing and silat (art of self defence)

Programmes being realized in relationship to sport on programmes and regional activities. In the programmes for realization and controlling activities in traditional sports. To promote and lead the activities of realization, evaluation of the activities and reporting and evaluation.

Regional activities on sport are comprising :
PORDATS (Sport Week of Eastern and Surrounding Areas) including Alor district, once in the three years period.
PORDAF (Sport week of Flores Land, once in the two years period)
PORDAS (Sumba) held once in the two years period for the Sumba Land.
PORDES (Sport Week for inter villages) in the sub-district level
BAPOR POR (Sport Week for government workers) carried out locally.
Elementary Schools POR, Yunior High Schools level, Senior High schools level in a phase being realized in every sub-district, district level, provincial and national scope.
POR of Higher Learning Institution, realized among local interinstitution.
EL TARI Memorial Cup : Foorball events on inter-districts level once in the three years.
Flobamor Cup. In particular for badminton competitions of inter-districts.

Promoting in the field of task-force sector has been realized among other in :

The promoting of functional sport in institutions/offices, villages, schools, middle educational institutions and higher learning institutions.
Sport instructors for 12 districts.
Coaches for 6 priority sport branches and branches under developed.
Promoting of sport organizations.
Refereé of 6 priority sport branches and the branches being developed.
Sport health: sport doctors, massage, physical fitness test.

Besides it, there were also acceleration of promoting sport organization managers and sport events conductors for the groups of village clubs, sport clubs managers and associations. Improvement of information system has been realized also through mass media and brochures. Improvement of 6 priority sport branches through athletics, volley, boxing, badminton, pencak silat (the traditional art of devence) and soccer. Also kempo, swimming, table tennis, chess, bridge, tennis, yudo and basketball.

For other sport development is in : hockey, softball and rolling skates while of national seeding are athletics and boxing.

For the mass sport are involved : athletics, soccer, volley, basket ball, badminton, swimming, table tennis and lawn tennis.

In the field of popular sport : athletics, boxing, football, volley ball, badminton, table tennis, karate, kempo and silat.

For special sport : invalid sports, physical fitness cara and recreational sport.

Traditional sports being promoted in 12 districts : Kupang 6 kinds of sports, south Timor Tengah 5, north Timor Tengah 3, Belu 5, Alor 5, East Flores 1, Sikka 5, Ende 7, Ngada 6, Manggarai 7, East Sumba 6 and West Sumba 6 traditional sports.

4. Health

Development in the sector of health in East Nusa Tenggara is pointed towards improvement of hygiene/sanitation, increasing of drinking water supply and the overcoming of infectious diseases such as : diarhee, TBC, malaria and diseases causing by people's lower economic condition. Besides that also raising funds in the society for health improvement, as a realization of social solidarity.

Information on people's health care.

Activities in communication and information with the efforts of mass approachment, have been done in the form of radio programmes, mobile film programmes, traditional communication media and exhibitions, besides by health care campaigns and group approachments. Since 1978 to 1983 12 new intensive working areas have been formed while still promoting the 34 old intensive areas. Promoting of medic and on medic workers in 1978 - 1983 reached 155 workers consisting of 100 medical workers and 55 non medical workers.

Nutrition

The efforts for family nutrition improvement covering over coming of nutrition deficiency-KKP -protein calory deficiency-, deficiency in A vitamins and







Kehidupan umat beragama dalam arti yang sesungguhnya terjaga sangat baik di NTT. Meskipun mayoritas penduduk memeluk agama Nasrani, kehidupan umat Islam juga berkembang menggembirakan. Rentetan peristiwa dan bangunan gedung tempat beribadat seperti nampak dalam gambar, menunjukkan keadaan tersebut.

The life of religious adherents is coloured with full tolerance in East Nusa Tenggara. Although the majority of its inhabitants are Christians, Moslems are not isolated. Appearing on the pictures, a series of religious activities and houses of worship, living peacefully, hand-in-hand.















Perhatian yang besar terhadap anak usia sekolah selalu mendapatkan prioritas yang tinggi dari Pemda. Pembangunan sektor ini memang kunci bagi keberhasilan pembangunan. Dalam gambar nampak anak-anak usia sekolah sedang dalam proses ke arah itu.

School-age children are given high priority by the Regional Administration. The development of this sector is the key to development success. Pictures show school-age children during daily activities.





Pembangunan phisik berupa gedung dan perkantoran dimaksudkan sebagai upaya untuk memperlancar dan mendukung roda pembangunan. Di Nusa Tenggara Timur variasi bangunan cukup beragam seperti nampak pada gambar. Antara lain Kantor Kabupaten Dati II Sumba Barat, Kantor Pengadilan Negeri Waingapu, Pengadilan Waikabubak, Kantor PLTD Waikabubak dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.

Physical development in forms of buildings and offices is intended to accelerate and to support the process of development. Many different styles and models of buildings are found in this Province. Pictures show the office building of West Sumba District, Court of Justice in Waingapu, Court of Justice in Waikabu, Diesel Power Station (PLTD) in Waikabubak, and Social Office of West Sumba in Waikabubak.

















Presiden Soeharto ketika meresmikan beroperasinya Pabrik Semen Kupang. Dalam kesempatan tersebut Presiden berkenan membubuhkan tandatangan pada bungkus produksi pertama Semen Kupang, disaksikan oleh Gubernur NTT dr Ben Mboi, dr Nafsiah (isteri Gubernur NTT itu). Gambar lain, Pabrik Semen Kupang sesaat akan dimulai peresmiannya oleh Presiden.

President Soeharto inaugurating the Kupang Cement Factory. On the opportunity, the President put down his signature on the first cement bag produced by the Kupang Cement Factory. The occasion was witnessed by the Governor of East Nusa Tenggara Province, Dr Ben Mboi, and the Governor's wife, Dr Nafsiah. Another picture shows the Kupang Cement Factory prior to inauguration.

Perkembangan pembangunan ekonomi akan sangat ditunjang peranannya oleh lembaga keuangan yang memadai. Di NTT, pembangunan kantor lembaga keuangan seperti Bank misalnya, telah dipenuhi secara memadai. Nampak dalam gambar, Kantor Bank Indonesia, Bank Pembangunan Daerah dan kantor Bank Rakyat Indonesia.

The growth economic development is closely related with the role of financial intermediaries. In East Nusa Tenggara the development of financial intermediaries such as banks has been adequately carried out. Appearing on the pictures are Bank Indonesia Office, Regional Development Bank and the office of Indonesia People Bank (Bank Rakyat Indonesia - BRI).





Sebagai daya tarik wisata, kuda Pasola dari Sumba memang menarik untuk dipromosikan sebagai obyek wisata. Meskipun demikian, gunung Rinjani juga tak kalah menariknya. Masih banyak lagi obyek wisata lainnya yang patut disuguhkan kepada para wisatawan. Kuda Pasola dan gunung Rinjani bisa kita saksikan melalui gambar di halaman ini.

From tourists point of view, "Pasola" horses from Sumba are very potential to be promoted as tourism object, while Mount Rinjani is no less attractive. Besides, many more tourism objects are worth seeing by tourists. Pasola, Sumba typical horse, and the beauty of Mount Rinjani can be enjoyed through the pictures on this page.









gulangan gondok endemik dengan komponen kegiatan serta lokakarya di tingkat Kecamatan.

Perbaikan gizi di 134 desa selama tahun 1978 - 1983 adalah sebagai berikut; tahun 1978/1979 disurvai keadaan gizi 9.400 anak; tahun 1979/1980 sebanyak 9.382; tahun 1980/1981 meningkat 16.045; tahun 1981/1982 sebanyak 16.698 anak Balita.

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Usaha Kesehatan Sekolah di NTT meliputi 3 unsur kegiatan yaitu pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan peningkatan lingkungan sekolah yang sehat. Jumlah sekolah yang tercakup dalam program UKS untuk tingkat sekolah dasar dalam prosentase 40,6% (tahun 1978/1979); 63,3% (1979/1980); 63,5% (1980/1981); 66,5% (1981/1982) dan sebesar 65,9% (tahun 1982/1983). Lihat Tabel IV-5.

Tabel / *Table IV — 5*

JUMLAH SEKOLAH YANG TERCAKUP DALAM PROGRAM UKS
TOTAL NUMBER OF SCHOOLS INVOLVED IN SCHOOL HEALTH EFFORTS PROGRAMME

No Jenis Sekolah *Kind of School*	TAHUN (%) / *YEAR*					Ket *Information*
	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	
1. Sekolah D. ar/ *Elementary School*	40,6	63,3	63,5	66,5	65,9	
2. S M T P/*Yunior High School Level*	3,3	3,1	2,6	14	14,2	
3. S M T A/*Senior High School Level*	—	—	2,6	15,7	24,6	

Sumber : Dinas Kesehatan Tingkat I NTT.
Source : Health Office of the province of East Nusa Tenggara.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Jumlah Puskesmas dalam tahun 1978 hingga 1982 mencapai 606 buah, sedang Puskesmas Pembantu 27 buah. Jumlah Balai Pengobatan 1.724 buah. Untuk mengetahui jumlah sarana kesehatan.Lihat Tabel IV-6.

KIA dan KB

Kegiatan Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana merupakan salah satu komponen dari kegiatan dalam Puskesmas dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak pra sekolah dan PUS (Pasangan Usia Subur). Sasaran kesejahteraan Ibu dan Anak kurang lebih 30% dari penduduk. Dengan perincian ibu hamil 4,4%; ibu bersalin 3,6%; ibu menyusui 3,5%, bayi 3,5% dan anak pra sekolah 16% dari penduduk.

Dalam Pelita III target KIA sebesar 50% kecuali untuk anak pra sekolah 30% dari sasarab. Adapun kegiatan keluarga berencana sasarannya adalah PUS (Pasangan Usia Subur) sebesar 18% dari penduduk. Dengan target bersifat kuatitatif menurunkan tingkat fertilitas tahun 1990 hingga 50%. Kegiatan KB di Nusa Tenggara Timur tiap tahunnya menunjukkan peningkatan, khususnya selama Pelita III.

Rumah sakit/Laboratorium

Jumlah rumah sakit untuk melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur sebanyak 24 buah dengan kapasitas tempat tidur 1.474 buah. Dengan perincian sebagai berikut:

1) 1 (satu) buah Rumah Sakit type C milik Pemerintah di ibukota Propinsi dengan kapasitas: 173 tempat tidur.
2) 9 (sembilan) buah rumah sakit type D milik Pemerintah di 9 Kabupaten dengan kapasitas: 439 tempat tidur.
3) 8 (delapan) buah rumah sakit type D milik swasta yang tersebar di 6 Kabupaten (Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Ende, Ngada, Flores Timur dan Belu) dengan kapasitas: 577 tempat tidur.
4) 1 (satu) buah rumah sakit Kristen milik swasta di Flores Timur dengan kapasitas 70 tempat tidur.
5) 2 (dua) buah rumah sakit bersalin milik swasta di Timor Tengah Selatan dan Ende dengan kapasitas 76 tempat tidur.
6) 3 (tiga) buah rumah sakit type D milik ABRI yang berada di Kabupaten Kupang dan Pelabuhan Udara El Tari dengan kapasitas 139 tempat tidur.

Bila dibandingkan dengan penduduk Nusa Tenggara Timur Sensus 1980 sebanyak 2.737.166 orang berarti/tempat tidur untuk 1.857 orang.

iron nutrition anemia, covering 134 villages in the period of 5 years. Besides overcoming of qoiter endemic with activity component and workshops in the sub-districts level.

Nutrition improvement in 154 villages during 1978 - 1983 are as such : 1978/1979 surveying of nutrition condition of 9,400 children; 1979/1980 totally 9,382; 1980/1981 increased to 16,045 children; 1981/1982 totally 16,698 children under five year old.

School's health care in East Nusatenggara is covering three elements activity i.e : health service, health education and improvement of healthy school environment. The total number of schools involved in this UKS -School Health Effort- on the level of Elementary school in 1978/1979 as much as 40,6 % percentage; 1979/1980 is 63,3 % percentage; 1980/1981 is 63,5 %; 1981/1982 is 66,5 % and 1982/1983 is 65,9 %. See Table IV - 5.

Public Health Centre.

The total number of PUSKESMAS - Public Health Centres - in 1978 to 1979 reached 606 buildings, and the auxiliary public health centres are as much as 27 buildings. The total number of medical clinics are 1,724 units. See Table IV - 6.

KIA - Mother And Child Health Care and KB - Family Planning.

The activities of KIA and Family Planning are one of the activities components in the Public Health Centres with the objectives of pregnant mothers, labouring mothers, suckling mothers, babies, preschool children and PUS (Fertile Age Couples). The target of Mother and Child Care is about 30 % of the whole population, with description of : pregnancy 4,4 %, birth 3,6 %, sckling/baby breast feeding 3,5 % infants 3,5 % and preschool children about 16 % of the whole population.

In the Pelita III the target of KIA totally as much as 50 % except for preschool children which was only as much as 30 %. The target of Family Planning is PUS (Fertile Age Couples), totally 18 % of the whole population, with the target to decrease quantitatively the degrees of fertility in the year 1990 on 50 %. Family Planning in the East Nusatenggara every year showing an increase, especially during Pelita III.

Hospital / Laboratory

The total number of hospitals to serve the people in the province of East Nusatenggara totally 24 buildings with bed capacity of 1,474 beds with the following details :

1) one hospital C type, owned by the state in the capital of the province with 173 beds capacity.
2) nine hospitals D type, owned by the state in nine districts with 439 beds.
3) eight hospitals D type, private's owned, spread in 6 districts (East Sumba, West Sumba, Manggarai, Ende, Ngada, East Flores, and Belu) with total 577 beds capacity.
4) one hospital owned by Christian organization (private), in Flores of Eastern district, with 70 beds.
5) two hospitals for birth service in south Timor Tengah, owned by private organization with 76 beds capacity.
6) three hospitals D type, owned by ABRI -military force- in Kupang district and El Tari airport, with 159 beds.

To be compared with the whole population according to 1980 census, totally 2,737,166, it means that 1 bed is proportioned to 1,857 persons.

Activity of the hospitals among other :

a. Internal patients care with healing rate of 97 % annually and mortality of 3 %. BOR usage in the rate of 49 % - 56 %. The rate of nursing days: 6.3 % - 6.7 %.
b. External patients care with the average daily visit of 80 - 97 persons, and from the activities of mobile health/medical care it is noted to be 20 types of desease.

Dental Health

Dental health service are provided in the Dental Care Clinics in the hospitals of the province and districts, except of Kalabahi general hospital due to lack of special dental health facilities (specialist). There are a number of increasing patients from12,626 to 17,337 in 1981/1982.

Combating of Infectious Diseases

Combating of infectious diseases have been done since 1978 - 1982 involving : malaria, filarisis, DHF -bloody fever, leprosis, frambusia, veneral disease, diarhee. cholera and TBC.

The activities on leprocy healing in 1978 with the target of 7,500 patients, was able to be realized totally 7,055 with 90 % percentage and in 1982 with the target of 8,600 patients, realized totally 6,741 or 78 %.

Tabel / *Table IV — 6*

PENYEBARAN SARANA KESEHATAN DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1978 SAMPAI DENGAN 1982
DISTRIBUTION OF HEALTH FACILITIES IN THE EAST NUSA TENGGARA

No	Kabupaten *District*	Puskesmas *Public Health Centre*					Puskesmas Pembantu *Auxiliary Health*					Balai Pengobatan *Medical Clinic Centre*				Puskesmas Keliling *Mobile Health Centre*							
																R o d a 4 *Four Wheels*					Perahu Motor *Wooden Vessel (Boat)*		
		1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982	1980	1981	1982
01.	Kupang	18	18	18	18	18	—	2	4	12	17	48	48	49	41	41	2	3	3	4	—	—	—
02.	TT Selatan	8	8	8	8	8	—	3	5	11	19	19	19	21	15	15	1	2	2	2	—	—	—
03.	TT Utara	6	6	6	7	8	—	3	5	8	9	18	18	20	17	17	1	1	1	3	—	—	—
04.	B e l u	6	6	6	7	8	—	3	5	6	10	16	16	17	13	13	1	1	2	3	—	—	—
05.	A l o r	7	7	7	8	9	—	2	5	6	9	25	25	27	25	25	1	2	2	2	—	—	—
06.	Flores Timur	15	15	15	16	16	—	—	3	4	12	40	40	37	40	40	2	3	4	5	—	—	—
07.	S i k k a	10	10	10	10	10	—	—	5	5	9	33	32	34	22	22	1	1	2	3	—	—	—
08.	E n d e	7	7	7	7	8	—	1	1	3	7	26	26	26	24	24	1	1	2	3	—	1	—
09.	N g a d a	8	8	8	8	9	—	1	4	5	7	32	32	32	29	29	1	2	3	4	—	—	—
10.	Manggarai	16	16	16	16	17	—	4	8	12	14	48	48	49	47	47	1	1	3	5	—1	—	—
11.	Sumba Timur	8	8	8	8	8	—	5	7	18	20	17	16	16	15	15	1	2	3	3	—	—	
12.	Sumba Barat	9	9	9	9	9	—	3	7	8	10	33	35	34	37	37	1	2	3	3	—	—	
	Jumlah / *Total*	119	119	119	122	127	—	27	59	98	143	355	357	362	325	325	14	21	21	40	1	1	—

Sumber : *Dinas Kesehatan Tingkat I NTT*
Source : Health Office of the province of East Nusatenggara.

Kegiatan yang dijalankan adalah :

a. **Rawat tinggal dengan angka kesembuhan rata-rata per tahun 97% dan angka kematian 3%.**
   Penggunaan BOR-nya rata-rata: 49% - 56%.
   Rata-rata hari perawatan : 6,3% - 6,7%
b. **Rawat jalan dengan rata-rata kunjungan per hari 80 - 97 orang dan dari kegiatan pengobatan jalan dicatat 20 jenis penyakit.**

Kesehatan gigi

Pelayanan kesehatan gigi dijalankan di Balai Pengobatan Gigi yang ada di rumah sakit Umum Propinsi dan Kabupaten, kecuali rumah sakit umum Kalabahi, sebab belum tersedia tenaga khusus. Kunjungan pasien yang berobat meningkat jumlahnya dari 12.626 naik menjadi 17.337 orang (tahun 1981/1982).

Pemberantasan penyakit menular

Pemberantasan penyakit menular dijalankan sejak tahun 1978—1982 meliputi malaria, filaris, demam berdarah (DHF), kusta, frambusia, kelamin, diare/kholera dan TBC paru.

Untuk kegiatan pengobatan penderita kusta dalam tahun 1978 target 7.500 dengan realisasi 7.655 dengan prosentase 90%.
Dalam tahun 1982 target 8.600 realisasi 6.741 dalam prosentase 78%.

Hygiene Sanitasi

Program penyediaan air bersih terutama ditujukan bagi penduduk perkotaan dan bagi Kabupaten/Kecamatan. Diharapkan pada akhir Pelita III masyarakat sudah mendapat pelayanan air bersih yang layak sesuai kebutuhan dasar meskipun belum memenuhi kebutuhan secara menyeluruh.

Usaha-usaha daerah ini meliputi pembangunan sarana unit produksi, pemasangan pipa transmisi, pemasangan jaringan pipa distribusi sampai pada sambungan rumah/hidran umum dan penyiapan pengusulan pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Kerangka kebijaksanaan berupa pendekatan kebutuhan dasar dengan standar yang lebih besar, sehubungan adanya perkembangan industri. Pada pihak lain pelayanan air bersih diusahakan dapat menjangkau 60% dari penduduk kota melalui sambungan rumah/hidran umum.

Guna melayani penduduk kota di seluruh ibukota kabupaten yang mencapai 350.000 jiwa diperlukan kapasitas produksi sebesar 330 liter/detik. Untuk peningkatan produksi sebesar 241 liter/detik saja misalnya, dibutuhkn dana sekitar 8,3 milyar rupiah. Dana ini diperuntukkan antara lain, pembangunan sarana unit produksi, pemasangan pipa transmisi, pemasangan jaringan pipa distribusi dan sambungan ke rumah-rumah/hidran umum di seluruh kota Kabupaten.

Pada akhir Pelita II baru satu ibukota Kabupaten yang diresmikan pemakaian air bersih. Pembangunan sumber air bersih tetap diusahakan melalui berbagai proyek pembangunan. Dari 12 proyek air bersih yang terdapat di kota-kota dan Kabupaten, 7 diantaranya telah berfungsi dan telah diresmikan pemakaiannya sekaligus dibentuk BPAM. Sisanya diharapkan selesai pada awal Repelita IV.

Kapasitas produksi dari BPAM tersebut telah meningkat dari 89 liter/detik menjadi 288 liter/detik. Atau 87% dari kebutuhan seluruh penduduk ibukota Kabupaten telah terpenuhi.

Pengembangan sarana air bersih dilakukan dari anggaran DIP Pusat sejak tahun 1980 - 1983. Dengan hasil PP 67%, SA 12%, PMA 89%, PAH 100%, SPT dangkal 16%, SPT dalam 4%. Pembangunan sarana air minum dan jamban keluarga (Bantuan Inpres) dilaksanakan sejak tahun 1978 - 1983. Dengan hasil yang dicapai PP 54%, SA 57%, PAH 73%, PMA 63%, SPT dangkal 75%, SPT dalam 9,5%, jamban keluarga 43% dan SGL 0%. Lihat Tabel IV-7 dan IV-8.

Imunisasi

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: pemberian kekebalan kepada masyarakat/penduduk terhadap penyakit TBC Paru, diftheri, pertusis, tetanus, polio dan campak dengan vaksinasi. Hasil kegiatan yang dicapai sejak tahun 1978 - 1983 rata-rata BCG bayi 84%, TT 59%, DPT 76,4%, polio 31% dan campak sebesar 2%.

Khusus untuk BCG anak tidak ditetapkan targetnya karena kegiatan hanya mencari. Sedangkan untuk polio dan campak baru dimulai tahun 1982 - 1983. Lihat Tabel IV-9.

Kependudukan

Berdasarkan sensus Penduduk tahun 1930 jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur sebanyak 1.343.000 jiwa. Sedangkan dalam sensus tahun 1961 meningkat menjadi 1.967.297 jiwa, kemudian dalam sensus tahun 1971 berjumlah 2.295.279 jiwa. Sementara berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 sudah menjadi 2.737.166 jiwa. Dalam sensus penduduk antar sensus (Supas) tahun 1985 jumlah penduduk propinsi ini sudah mencapai 3.029.061 jiwa.

Sanitation Hygiene

Programme of water supply especially directed for urban population and for districts and sub-districts people. It is hoped that to the end of Pelita III, the people already received the water supply service in accord with the basic needs although not yetfulfiling the whole demand.

Endeavours in this region including construction of production facility units, construction of transmission pipelines, construction of distribution pipelines network to reach houses and public hydrants and the preparation for the proposal of BPAM, establishment (Drinking Water Management Body). The structure of policy in the form of the basic demands apporachment with an increasing standard, in relation to the existence of industrial development. In other side the service of clean water supply is also to reach 60 % of urban people through houses and public hydrants transmission.

Within the purpose to serve the whole people in the districts' capital covering about 350,000 people, there is a need for production capacity as large as 330 litre/second. To increase production only to 241 litre/second there is needed funds about Rp8.3 billions. This fund is used for among other for construction of production facility units, construction of transmission pipelines, construction of disctribution pipelines network and conection to houses and public hydrants in all capitals of districts.

At the end of Pelita II, just only one district's capital received clean water service. Development of clean water resource is continually still in efforts through various development projects. From 12 clean water projects in the cities and districts, 7 of them are already in function, have been legalized and already provided with BPAM -Drinking Water Management Body-. The rest still hoped to be finished in the beginning of Pelita IV.

Production capacity of BPAM mentioned already increased from 69 litres/second to 288 litre/second, or 87 % from total need already been reached.

Improvement of clean water facility had been funded from DIP - Table of Projects Form of the central government since 1980 - 1983, with the result of : PP 67 %, SA 12 %, PMA 89 %, PAH 100 %, SPT shallow 16 % and SPT deep 4 %. Development of Drinking Water facility and Family lavatory (INPRES -Presidential Instruction- Aid) have been realized since 1978 - 1983, with the result as follows : PP 54 %, SA 57 %, PAH 73 %, PMA 63 %, SPT shallow 75 %, SPT deep 9,5 %, family lavatory 43 % and SGL 0 %. See Table IV-7 and IV-8.

Immunization

Activities done consisting of : Immunization of the people against TBC, dipthery, pertusis, tetanus, folio and measles with vaccination. The result achieved since 1978 - 1983 approximately BCG for infant 84 %, TT 59 %, DPT 76,4 %, polio 31 % and measles 2 %. BCG for children inparticular was conducted without target but only to look for occurance, while for polio and measles just started in 1982 - 1983. See Table IV - 9.

Population

According to the 1930 census, the total population of East Nusatenggara were 1,343,000. In the census of 1961 the number reached to 1,967,297. Increased again the census of 1971 to 2,295,279, and in 1980 the number already as much as 2,737,166. In the intercensus data of the population census (SUPAS) in 1985, total province population already reached 3,029,061 people.

It is clear from the mentioned result of the census that total population is continually increasing, with the rate of annual growth in an increasing number from period to period. For the period of 1930 - 1961 the rate was 1,24 %, the period of 1961 - 1971 the rate was 1,55 % and the rate of 1971 - 1980 cited 1,98 %.

During these last 5 years, the increase was about 2,05 % every year, namely from 2,737,166 in 1980 to become 3,029,061 in 1985. Yet the rate of increase of population in the province is still under the rate of increase in national scale.

Jos Seekers

Based on the census in 1971, total number of job seekers in the East Nusatenggara are as much as 98,809 persons. In 1978 decreased to only 13,583 seekers. In 1980 census the total number of job seekers againdropped to only 6,180 persons. Their number going smaller and with the hope that those being already in work can be able to maintain a higher productivity.

Population Policy

The policy taken by the province's administration was taken constantly on the basic of three main targets i.e. :

1). Rearrangement of the people and their inhabitating locations to the places where they will economically more productive. Because about 70 % of

Tabel / *Table IV — 7*

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DIP DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN 1980 - 1983
ACHIEVEMENT OF CONSTRUCTION OF THE CLEAN WATER FACILITY DIP (TABLE OF PROJECTS FORM) OF THE HEALTH DEPARTMENT

Tahun *Year*	Jenis Sarana / *Kind of Facility*											
	P P *Piping networks*		SA		PMA *Spring water reservoir*		PAH *Rain water reservoir*		SPTDKL *Shallow manual pump well*		SPTDLM *Deep manual pump well*	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1980 s/d 1981	3	3		—	40	40	1	1		—	—	—
1981 s/d 1982	—	—		2	115	115		—		—	—	—
1982 s/d 1983	—	—		3	200	162	—	—		8	100	4
Jumlah/ Total	3	2		5	355	317	1	1		8	100	

Sumber : Dinas Kesehatan Tingkat I NTT.
Source : Health Office of the province of East Nusatenggara.

Tabel / *Table IV — 8*

PENCAPAIAN PEMBANGUNAN SARANA SAMI JAGA BANTUAN INPRES TAHUN 1978 - 1983
ACHIEVEMENT OF CONSTRUCTION OF THE DRINKING WATER AND FAMILY LAVATORY INPRES AID

Tahun Anggaran *Budget Year*	Jenis Sarana / *Kind of facility*																	
	P P *Piping networks*				PAH *Rain water reservoir*		PMA *Spring water reservoir*		SPTDKL *Shallow manual pump well*		SPTDLM *Dopp manual pump well*		J K *Family lavatory*		SGL		SPAL	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1978/1979	1	1	—	—	7	2	15	4	60	18	50	—	2000	858	—			
1979/1980	1	1	—	—	5	5	16	16	60	60	50	50	1500	1500	—			
1980/1981	4	3	—	—	15	15	16	16	100	100	60	—	1500	1500	—			
1981/1982	3	2	4	4	260	260	13	13	1000	1000	150	. —	4000	—	125			
1982/1983	4	—	3	—	100	—	18	—	343	—	212	—	—	—	125			
Jumlah/Total	13	7	7	4 ·	387	282		49	1563	1178	522	50	9008	3858	250			

Sumber : Dinas Kesehatan Tingkat I NTT
Source : Health Office of the province of East Nusatenggara.

Dari hasil sensus penduduk itu nampak bahwa jumlah penduduk daerah itu terus meningkat. Dengan angka pertumbuhan per tahun (rate of growth) menunjukkan kenaikan dari periode ke periode selanjutnya. Untuk periode 1930 - 1961 sebesar 1,24%; periode tahun 1961—1971 sebesar 1,55%. Untuk periode tahun 1971 - 1980 sebesar 1,98%.

Selama 5 tahun terakhir ini, jumlah penduduk bertambah rata-rata 2,05% tiap tahunnya. Yaitu dari sejumlah 2.737.166 jiwa di tahun 1980 menjadi 3.029.061 jiwa pada tahun 1985. Namun demikian angka-angka kenaikan pertumbuhan penduduk masih di bawah angka pertumbuhan Nasional.

Pencari Kerja

Berdasarkan sensus di tahun 1971 jumlah pencari kerja di Nusa Tenggara Timur 98.809 orang, tahun 1978 menurun menjadi 13.583 orang. Sementara dalam sensus penduduk tahun 1980 jumlah pencari kerja semakin menurun menjadi hanya 6.180 orang. Jumlah pencari kerja semakin kecil. Dan diharapkan mereka-mereka yang sudah bekerja mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Kebijaksanaan kependudukan

Kebijaksanaan yang diambil Pemerintah Daerah adalah tetap berlandaskan kepada tiga sasaran pokok, yaitu :

(1) Penataan kembali penduduk dan lokasi pemukimannya, ke tempat-tempat yang ekonomis produktif. Sebab sebesar 70% penduduk propinsi ini bermukim di daerah-daerah kritis.
(2) Perbaikan tingkat kesehatan dan gizi penduduk sesuai standar Nasional.
(3) Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja digabung dengan peningkatan ketrampilan dan teknologi produktif di lapangan pertanian.

the people are living in the critical areas.

2). Improvement of the health degree and nutrition conditionof the people in accordance with national standar.

3). Supply of working vacancies and working opportunities to be combined with improvement of skills and productive technology in agriculture field.

For the resettlement policies of the population in each of the districts of Kupang, South Timor Tengah, Belu, Alor, East Flores, Ngada, Sikka, Manggarai, Ende, East Sumba, and West Sumba.

Family Planning

The national programmes of population and family planning in the province of East Nusatenggara have been carried out since the beginning of Pelita III. Total number of family planning new participants in 1979 until November 1982 as much as 59,594 couples. Thos who active using contraception totally 28,760 couples or 77.66 % per thousand PUS (Fertile Age Couples), or 7.7 % (370,319). this means that 1,000 PUS among them are 78 couples as active family planning participants.

Degree of achievement of active family planning participants per method in the province of East Nusatenggara are as follows :

IUD	: *10,535.*	*or*	*36,63 %*
PILL	: *13,316.*	*or*	*45,95 %*
Condom	: *1,486.*	*or*	*5,17 %*
MOP/MOW	: *1,403.*	*or*	*4,88 %*
Injection	: *2,120.*	*or*	*7,37 %*
Total	: *28,120.*	*or*	*100,00 %.*

Tabel / *Table IV — 9*

HASIL KEGIATAN VAKSINASI DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 1978 - 1982
RESULT OF VACCINATION ACTIVITY IN THE PROVINCE OF EAST NUSATENGGARA

JENIS VAKSINASI *Kind of vaccination*	1978/1979 Tgr *Target*	1978/1979 Real *Realization*	1979/1980 Tgr *Target*	1979/1980 Real *Realization*	1980/1981 Tgr *Target*	1980/1981 Real *Realization*	1981/1982 Tgr *Target*	1981/1982 Real *Realization*	1982/1983 Tgr *Target*	1982/1983 Real *Realization*
BCG Bayi/ *Infant's BCG*	38.107	81%	34.710	100%	48.966	60%	40.000	100%	45.000	78%
BCG Anak/ *Children's BCG*	—	2.356	—	11.063	—	21.771	—	33.816	—	21.736
D P T	1.039	72%	3.787	69%	9.23	59%	9.000	100%	14.000	82%
T T	780	35%	5.049	100%	9.023	34%	9.000	79%	14.000	45%
Polio	—	—	—	—	—	—	—	—	—500	31%
Campak/ *Measles*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.200	2%

Sumber : Dinas Kesehatan Tingkat I NTT.
Source : Health Office of the province of East Nusatenggara.

Untuk kebijaksanaan resetlement penduduk masing-masing dilaksanakan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Flores Timur, Ngada, Sikka, Manggarai, Ende, Sumba Timur dan Sumba Barat.

Keluarga Berencana

Program Nasional kependudukan dan keluarga berencana di propinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan sejak awal Pelita III. Jumlah peserta keluarga berencana baru tahun 1979 hingga Nopember 1982 sebanyak 59.594 pasangan. Yang aktif menggunakan alat kontrasepsi 28.760 pasangan atau 77,66 per seribu Pasangan Usia Subur (PUS), atau sebesar 7,7% dari PUS (370.319). Berarti tiap 1.000 PUS terdapat 78 peserta KB aktif.

Tingkat pencapaian peserta Keluarga Berencana Aktif per metode di propinsi ini adalah sebagai berikut:

IUD	:	10.535 atau 36,63%.
PIL	:	13.316 atau 45,95%.
Kondom	:	1.486 atau 5,17%.
MOP/MOW	:	1.403 atau 4,88%.
Suntikan	:	2.120 atau 7,37%.
TOTAl	:	28.760 atau 100,00%.

Untuk lebih memantapkan pencapaian program tersebut, dalam tahun 1983/1984 Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat digolongkan sebagai daerah pengembangan fase II yaitu pencapaian 16% dari PUS atau ditargetkan sejumlah 59.093 akseptor aktif. Disamping pembentukan 370 PPKBD dan mendidik tenaga pelaksana serta pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) 483 orang.

Target dan Sasaran

Sasaran peserta KB baru tahun 1982/1983 sekitar 45.255. Tetapi dalam waktu relatif singkat sampai Pebruari 1983 sudah tercapai 22.661 peserta, yang berarti telah dicapai 50,07%.

Dilihat perkembangan per Kabupaten, terdapat 1 Kabupaten yang telah melampau target yaitu Kabupaten Belu (102,60%). Sedangkan sasaran Pelita III untuk Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah 116.965, namun realisasinya baru mencapai 67.977 peserta KB baru. Dengan demikian sampai akhir Pelita target KB baru diperkirakan tidak akan tercapai.

Jika dilihat dari metode kontrasepsi yang digunakan, maka prosentase terbesar adalah Pil (46,26), kemudian IUD (28,24%), Kondom (4,9%), Suntikan (17,85%) dan metode lain mencapai jumlah (2,75%). Dari data ini jelas terlihat bahwa minat penggunaan alat kontrasepsi suntikan naik.

Dari hasil pembinaan kelestarian peserta KB selama Pelita III nampak adanya perkembangan yang mulai meningkat. Pada tahun pertama Pelita III (1979/1980) jumlah peserta KB aktif sekitar 3.867, tahun 1980/1981 meningkat menjadi 15.811 (26,51% dari target), dan tahun 1982/1983 meningkat menjadi 34.801 (65,65% dari target).

Meskipun secara propinsi pencapaian target sasaran peserta KB aktif belum memenuhi harapan, namun dilihat per Kabupaten mulai tahun 1981/1982 terdapat 2 (dua) Kabupaten yang melampaui target yaitu Belu 154,86% dari target dan Kabupaten Timor Tengah Selatan 115,20% dari target.

To make more intensive of such acievement, in the year of 1983/1984, East Nusatenggara was expected to enter the group of phase II expansion area, i.e. with acievement of 16 % from PUS, or with the target of 59,093 active acceptors. Besides the formation of 370 PPKBD (Guider of Regional Family Planning) also in the realization of training the managers and field workers of population and family planning programmes, as much as 483 members.

Target and Goal.

Target of new acceptors in 1982/1983 were about 45,255, but in relative short period, until February 1983 the number already reached 22,661 acceptors, which meant that the target has already been reached to 50,07 %.

To be seen from the district's achievement, one district already succeded to reach overtarget i.e. 102,60 %, viz. the district of Belu. The goal of Pelita III for the province of East Nusatenggara were 116,965 accepetors, yet the realization is still reaching 67,977 new acceptors only. Under such estimation, it can be expected that the Pelita III new acceptors target will not be reached.

To be seen from the method of contraception used, the greatest percentage is Pill (46.26 %), and then IUD (28.24 %), Condom (4.9 %), Injection (17.85 %) and other methods 2.75 %. From this date it can be seen that injection usage among acceptors increase in number.

From the result of promoting family planning participants, during Pelita III it can be seen an increasing number. In the first year of Pelita III (1979/1980), total number of active acceptors were 3,867, 1980/1981 increased to 15.811 (26.51 %) and in 1982/1983 increased to 34,801 (65.65 %).

Although on the provincial level the target achievement in family planning programme is still out of expectation, in the district's figures, in 1981/1982 there were two districts with over target, i.e. the district of Belu (154.86 %) and the district of South Timor Tengah (115.20 %). In 1982/1983 the district of Belu again reached overtarget with percentage of 127.05 % while North Timor Tengah district reached 120.87 %. From the rest of 10 districts which were unable to reach the target 5 were under 50 % i.e. : the district of East Flores (21.85 %), Ngada (36.19 %), Alor (33.00 %), West Sumba (45.88 %) and the district of Ende 49.72 %.

5. Social Welfare Aspects.

In the situation and condition of the people of East Nusa Tenggara in the relation to social welfare, they are living in a position under the line of poverty, as a result of their social and geographycal condition. Then the problem of social welfare facing is clearly the poverty itself, being destituted, disabled, backwardness/isolated, social destitute, victims of natural disasters and other victims with social value system and negative social system.

One of the reasons of the child/juvenile neglection in this region in general is caused by family factor, social environment and culture. The factors acuse the child to refuse to go to school and or to stay out of school before reaching a certain mature degree expected.

Child and Juvenile Dropped Out

In 1980 the total number of children and juveniles dropouts in the Elementary Schools level with the total number of 464,434 pupils composition were

Pada tahun 1982/1983 terdapat dua Kabupaten yang telah melampau target yaitu Kabupaten Belu 127,05% dan Kabupaten Timor Tengah Utara 120,87%. Dari 10 (sepuluh) Kabupaten yang belum mencapai target terdapat 5 (lima) Kabupaten di bawah 50%, masing-masing: Flores Timur 21,85%, Ngada: 35,19%, Alor: 33,00%, Sumba Barat: 45,88% dan Ende: 49,72%.

5. Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam situasi dan kondisi kesejahteraan sosial rakyat Nusa Tenggara Timur yang berada di bawah garis kemiskinan sebagai akibat kondisi geografis dan sosial, masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi adalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterbelakangan/keterasingan, ketunaan sosial, korban bencana alam, korban-korban lainnya dan sistem nilai serta sistem sosial yang negatif.

Salah satu penyebab timbulnya keterlantaran anak/remaja di daerah ini umumnya karena faktor keluarga, lingkungan masyarakat dan kultur. Ini menyebabkan keengganan anak untuk belajar dan/atau meninggalkan bangku sekolah sebelum mencapai tingkat kematangan tertentu.

Anak dan Remaja Putus Sekolah

Tahun 1980 jumlah anak dan remaja putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan komposisi jumlah murid 464.434 mencapai 61 anak. Dengan populasi real drop out sebesar 283.305. Untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan jumlah murid 67.416 yang drop out 57%, dengan populasi real drop out 38.427. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah murid 32.875 yang droup out 49% dengan populasi real drop out 16.109. Dengan perbandingan jumlah murid dari semua tingkatan 564.725 murid, populasi real drop out di Nusa Tenggara Timur mencapai 337.841 murid.

Para Usia Lanjut

Aspek sosial dari kelanjutan keterlantaran adalah pengayoman terhadap para lanjut usia yang kurang wajar, karena keluarga menganggap sebagai beban ekonomi keluarga. Anggapan tersebut diperlihatkan pada tingkah laku dan perlakuan terhadap para jompo/lanjut usia. Dari 2.737.166 orang penduduk Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1982, yang berusia 55 tahun ke atas sebanyak 164.231 orang. Diantaranya 109.377 tergolong mampu, 30.952 orang termasuk ekonomi lemah dan 21.490 disabledage.

Keterbelakangan/Keterasingan

Keterasingan masyarakat dapat diartikan, mereka-mereka yang memukimi tempat-tempat yang sulit dijangkau. Secara fisik dan non fisik mereka menjauhkan diri dari jangkauan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah. Di Nusa Tenggara Timur keterasingan dikatagorikan dalam katagori masyarakat terasing "Setengah Kelana". Dalam tahun 1982 jumlah masyarakat/suku terasing berada di 7 kabupaten mencapai jumlah 8.441 KK.

Korban Bencana Alam

Di Propinsi Nusa Tenggara Timur ada 2 (dua) penyebab terjadinya Bencana Alam, yaitu :
Karena gerak alam, dan karena kelalaian manusia.
Yang bersumber dari gerak alam terjadi karena : Gempa bumi dan gunung meletus; Tanah longsor; Angin frekuensi kecepatan tinggi; Ombak/gelombang laut dan pasang laut yang besar (Tsunami) dan Banjir. Sedangkan yang bersumber pada kelalaian manusia dalam mengelola alam adalah karena Kebakaran dan Kecelakaan perahu.

Bencana alam tanah longsor ini umumnya terjadi karena kondisi geografis, curah hujan yang tidak stabil dan kelalaian manusia. Secara khusus penggundulan hutan didapati di: Pulau Timor meliputi 54% daratannya, Pulau Flores meliputi 42% daratannya, dan Pulau Sumba meliputi 28% daratannya.

Data tersebut memberikan indikasi betapa kritisnya kondisi tanah di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar bergunung-gunung dengan perbukitan yang terjal, dimana sistem perladangan liar di atasnya menyebabkan erosi terus menerus. Lihat Tabel IV-10.

Bantuan Sosial untuk menanggulangi bencana alam dan bencana lain-lain yang terjadi di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, baik Departemen Sosial maupun Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur telah memberikan bantuan berupa bahan makanan, pakaian maupun bantuan keuangan.

Untuk penyantunan korban bencana alam dalam tahun 1978/979 sampai dengan 1982/1983 telah dibangun proyek penyantunan korban bencana alam.

Khusus bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur dan Sikka yang ditimpa bencana alam banjir, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi dan gunung api, telah diperoleh bantuan penyantunan

61 children, with total areal dropouts as much as 283,305. For the Yunior School level with total number of pupils composition as much as 67,416, the dropouts were 57 % with total real dropouts as much as 38,427. In Senior High School level in the composition of total pupils as much as 32,875, dropouts percentage was 49 % with total real number of 16,109. With total composition as a whole as much as 564,725 pupils for the whole levels, total number of dropouts reached 337,841 children.

The Old Aged Persons

The social aspect of being further neglected is an insufficient care for the old aged persons, because the family described themas an economic burden for the family. This opinion can be seen in the attitudes shown towards those aged people.

From 2,737.166 number of the East Nusa Tenggara population in 1982, those who reached the age above 55 years old enumbered totally 164,231 persons, among others 109,377 can be categorized as rich, 30,952 poor persons and 21,490 disabled.

Backwardness / Isolated

Isolated from society means those who are living in the places difficult to be reached. Physically and non physically they are getting away from the reach of the other people or government services. In East Nusatenggara this isolation is categorized as "half nomads". In 1982 the number of isolated people or primordial tribe reached tp 8,441 families spread in 7 districts in the province.

Victims of Natural Disasters.

In the province of East Nusa Tenggara there are 2 causes of natural disaster i.e. : Caused by natural movements or because of man's negligence. From the cause of natural movements can be cited for instance : Earthquakes, mountain eruptions, landslides, cyclone/tornado, waves/tsunami (a sudden great tide and flood), while from the causes of man's fault in managing the nature environment among other : fires and canoes accidents.

Disaster of landslides in general happes because of geographycal condition, instable rainfall and man's negligence. In particular the cutting of forest can be found on Timor island covering about 54 % from its land, Flores island 42 % and Sumba island as much as 28 % from the whole land area.

The data gives an indication how critical the condition of the land of the province of East Nusa Tenggara which in greater part consists of mountains with steep hills, where wild irregular planting system on it causes continuous erotion.

Social subsidy to overcome natural disasters and other disasters in the province of East Nusa Tenggara, either from the Department of Social Affairs or from the government of the province regional administration have been given in the form of foods, clotches or financial aids.

For the victims of natural disasters in 1978/1979 to 1982/1983, a project of natural disasters assistancy has been established. Especially for the East Flores district and Sikka district which were run by flood, landslides, tidewaves, earthquakes and mountain eruption, a sum of presidential aid have been received as follows :

– For 500 families a sum of Rp212,500,000,- i.e. for 400 families in Loang, the district of East Flores and 100 families in Patisomba, the district of Sikka. Besides that there was also an additional amount of Rp59,000,000,- for the purpose of

- *500 cooking pots*
- *500 pieces of agricultural tools (swords and hoes)*
- *construction of 20 waterpumps (one pumpe for five families) only in Patisomba, the district of Sikka.*
- *Additional fund for 400 houses rehabilitation in Loang, the district of East Timor (each house abour Rp100,000).*

– For combating flood and landslides disasters in Larantuka sub district, 175 couples of houses have been constructed by Perumnas (national Housing State s Enterprise) for 250 families in Weri.

– For 400 families resettlement in the locations : Konga 100 families, Waimana 80 families and Oa beach, 220 families, have been given assistancy fund as much as Rp220,000,000,- by the president of the state.

For the sake of the development of the area of natural disaster in North Timor Tengah, the government of Australia has given a subsidy of Rp23,350,000,-. Besides it CRS (Christian Relief Service) also has donated an amount of 600 tons of rice for each district in the province. All of the funds have been forwarded to the districts to buy agricultural tools, seeds, supply and operational costs. See Table IV - 10.

Tabel / *Table IV — 10*

DATA PERISTIWA BENCANA ALAM ANGIN TOFAN DAN TANAH LONGSOR DI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1978 s/d 1982
DISASTERS DATA OF CYCLONE AND LANDSLIDES IN THE EAST NUSA TENGGARA

Tahun Kejadian *Year of events*	Angin Tofan *Cyclone*			Tanah Longsor *Landslides*		
	Frekwensi (×) *Frequency*	Penderita (Jiwa) *Victims (persons)*	Meninggal (Jiwa) *Dead (persons)*	Frekwensi (×) *Frequency*	PenderitaK (Jiwa) *Victims (persons)*	Meninggal (Jiwa) *Dead (persons)*
1978/1979	48 ×	109.961	—	44 ×	28.289	—
1979/1980	25 ×	10	—	25 ×	26.369	—
1980/1981	25 ×	12.265	—	31 ×	11.520	—
1981/1982	10 ×	2.727	—	32 ×	10.419	8
1982/1983	4 ×	120	—	2 ×	—	—
Jumlah / *Total*	112 ×	125.083	—	134 ×	76.597	8

Sumber : *Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1982.*
Source : Regional Office of Social Affairs of the province of East Nusa Tenggara 1982.

dari Presiden sebagai berikut:

— Untuk 500 KK diberikan bantuan dana sebesar Rp212.500.000,- bagi 400 KK di Loang Kabupaten Flores Timur dan 100 KK di Patisomba Kabupaten Sikka.
Disaming itu telah diperoleh biaya tambahan sebesar Rp59.000.000,00 yang diperuntukkan:

— 500 buah periuk.

— 500 perangkat alat pertanian (parang dan cangkul)

— Pemasangan 20 buah pompa air (1 buah pompa untuk 5 KK) khusus di Patisomba Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka.

— Tambahan biaya pembangunan 400 buah rumah di Loang Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur (tiap rumah Rp100.000,00).

— Untuk penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor di Kecamatan Larantuka, oleh Perumnas telah dibangun sebanyak 175 buah rumah Kopel untuk 250 KK di Weri.

— Bagi 400 KK oleh Presiden diberikan bantuan dana sebesar Rp220.000.000,00 untuk pemukiman kembali lokasi-lokasi: 100 KK di Konga, 80 KK di Waimana dan 220 KK di Pantai Oa.

Untuk pengembangan daerah bencana alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara oleh Pemerintah Australia telah diberikan bantuan uang Rp23.350.000,00.
Selain itu CRS telah memberikan bantuan beras 600 ton untuk masing-masing kabupaten. Seluruhnya telah diteruskan ke kabupaten-kabupaten untuk pembelian alat-alat pertanian, pengadaan bibit dan biaya operasional.

Pembinaan sumbangan sosial

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang telah dikeluarkan Surat Keputusan Pengumpulan Uang atau Barang sebanyak 112 buah surat keputusan dengan perincian sebagai berikut: Rekomendasi 1 buah, ijin pengumpulan uang dan barang 99 buah, perpanjangan ijin 11 buah dan surat teguran 1 buah.

Dalam usaha penanggulangan pengungsian di daerah Tingkat II Belu, atas kerjasama dengan Departemen Sosial dan CRS telah didrop bantuan beras sebanyak 1.008 ton dan biaya operasional sebesar Rp20.000.000,00.

6. Perumahan Rakyat

Mendorong dan mempercepat pengadaan rumah rakyat yang sehat dan bersih di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan penyuluhan dan pembinaan kepada warga masyarakat. Arti penting penataan rumah sehat serta lingkungan pemukiman yang nyaman. Perumahan rakyat yang dimaksud di sini, perumahan yang berdasarkan lokasi, yakni di desa melalui Proyek Perintis Pemugaran Desa (P3D). yaitu dengan cara stimulans bagi satu desa, sedangkan target 50% dari pada sasaran 80% seluruh desa di propinsi yang mencapai 1.720, dengan demikian yang harus ditangani di Nusa Tenggara Timur adalah 50% × 80% × 1.720 desa = 688 desa.

Dalam Pelita III Pemerintah telah merealisir pembangunan pemukiman dan lingkungan yang sehat, baik melalui dana APBN dan APBD proyek-proyek pemukiman desa, penyantunan korban bencana alam, bantuan Presiden dan Pemugaran Inpres bantuan desa.

Promoting of Social Donation

In relationship with the realization of Law No 9 of 1961 about finance and goods collection, 112 letters have been issued on the decisions concerning Finance and Goods gathering with the following details : one recommendation, 99 permits for finance and goods gathering, 11 permits extension and one letter of admonition.

In the efforts to overcome the problems of regugees in the district of Belu, as the result of corporation between the Department of Social Affairs and CRS (Christian Relief Service), there have been dropped rice supports as much as 1,008 tons with operational costs about Rp20,000,000,-.

6. Public Housings

To encourage and accelerate the supply of clean and healthy public housing in the province of East Nusa Tenggara information and guidance have been given to the people. Concerning the principle meaning of healthy housing arrangement and favourable housing environment. The main purpose of such housing betterment programme is for the rural housing, through P3D (project of pioneering villages rehabilitation) i.e. through stimulation for the village. While 50 % from the 80 % goal of the whole 1,720 rural villages in the province, the programs be counted as : 50 % X 80 % X 1,720 = 650 villages.

In the period of Pelita III the government has already realized the construction of healthy living environment, either by APBN (The state's Income and Expenditure Budget) or by APBD (The Regional Income and Expenditure Budget) in the projects of rural inhabitation, natural disasters victims asistancy and also by presidential aid support and for village rehabilitation (Inpres of villages' aid).

The classification of rural areas in the East Nusa Tenggara will be as follows : From 1,720 villages there are 649 self effort villages, 37.7 %, self working villages about 896 or 52.09 % and self supporting villages as much as 175 or 10.18 %.

In order the policy in development of public housings and healthy environment to be directed towards the improvement of self effort villages which in 1982 were totally 1,138 villages and the selfworking villages in 1982 were totally 1,186 villages through the programme of rural housing rehabilitation aid, while for self support villages which were the rst of the whole, through development programme policy.

Housing Restoration

Activities in housings restoration since 1978/1979 to 1982/1983 in this region among others are as follows : in 1978/1979 the total number of restoration were 80 houses, funded by the State's Income and Expenditure Budget (APBN) as much as Rp2,761,000,- In 1979/1980 also totall 80 units with total fund of Rp3,531,000,- from the State's Income and Expenditure Budget. In 1980/1981 the rehabilitation increased to 250 units, i.e. under APBN State's fund as many as 200 units and APBD (regional budget) 50 units with total cost of Rp17,971,000,-. In 1981/1982 the total rehabilitation as much as 290 units i.e. APBN 240 units and APBD 50 units with fund as much as Rp17,971,000,- and Rp30,000,000,-. And 1982/1983 total rehabilitation as much as 255 units, i.e. APBN 240 units and APBD 15 units with total costs as much as Rp15,360,000,- and Rp10,000,000,- See Table IV-11.

About handling the urban inhabitation in particular, its realization has been done through the project of urban housings environment rehabilitation (PUKP). This project is handling in particular housing environment rehabilitation, for example as : neighborhood roads, lanes, drainage for rainfall and spillways, cleanwater reservoir, garbage facilities and MCK (Bat-Wash-Lavatory).

Since 1978/1979 until 1982/1983, through PLKP project 6 cities have been rehabilitated with an area of 158 Ha with total fund of Rp483,700,000,-. In the same budgeting year, for P3D (Villages rehabilitation pioneering projects), had been realized housing renovation for 174 villages, with total houses of 3,848 units with total fund of Rp1,002,453,700,-.

Through the project of promoting self-supporting in the housing and living environment, houses have been constructed in the province through APBN funds as much as Rp302,000,000,- with the details as such : 1978/1979 Rp9,000,000,-; 1979/1980 Rp28,000,000,-; 1980/1981 Rp43,000,000,-; 1981/1982 Rp71,000,000,-; and 1982/1983 an amount of Rp151,000,000,-.

In the efforts to realize the promoting of social welfare on housing construction by cooperative / mutual selfhelp, training on social selfsupport in housing construction have been conducted in 24 sessions in the districts of the province, with total participants of 692 families, each family received Rp100,000,-

Nusa Tenggara Timur dengan klasifikasi desa dari 1.720 terdapat Desa Swadaya (649 buah atau 37,7%), Desa Swakarya (896 buah atau 52,09%) dan desa Swasembada (175 buah atau 10,18%). Agar kebijaksanaan pembangunan perumahan rakyat dan penyehatan lingkungan diarahkan kepada usaha mengembangkan Desa-desa Swadaya (yang pada tahun 1982 berjumlah 1.138 buah) dan Swakarya (tahun 1982 berjumlah 1.186 buah) melalui program bantuan pemugaran perumahan pedesaan, sedangkan untuk Desa-desa Swasembada melalui kebijaksanaan program.

Pemugaran Perumahan

Kegiatan pemugaran perumahan rakyat sejak tahun 1978/1979 hingga tahun 1982/1983 di daerah ini adalah sebagai berikut: dalam tahun 1978/1979 jumlah desa yang dipugar 80 buah dengan dana APBN Rp2.761.000,-; tahun 1979/1980 dipugar 80 buah dengan dana APBN sebesar Rp3.531.000,-; tahun 1980/1981 sebanyak 250 buah (APBN 200 + APBN 50) dengan dana Rp(Rp.17.414.000,- dan Rp30.000.000,-); Tahun 1982/1983 dipugar 255 buah (APBN 240 + APBD 15) dengan dana (Rp15.360.000,- dan Rp10.000.000,-); Di tahun 1981/1982 dipugar 290 buah (APBN 240 dan APBD 50) dengan dana sebesar (Rp17.971.000,- dan Rp30.000.000,-). Lihat Tabel IV-11.

Khusus mengenai penanganan perumahan kota, pelaksanaannya dilakukan melalui Proyek Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota (PLKP). Proyek ini khusus menangani perbaikan lingkungan perumahan, misalnya, jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air hujan dan air lembah, penyediaan air bersih, fasilitas sampah dan MCK.

Sejak tahun 1978/1979 sampai tahun 1982/1983, melalui proyek PLKP telah ditangani 6 (enam) buah kota dengan luas 158 Ha, dengan dana sebesar Rp483.700.000,-. Sedangkan hasil pelaksanaan melalui proyek P3D pada tahun anggaran yang sama telah direalisir pemugaran rumah bagi 174 desa dengan jumlah rumah yang terpugar sebanyak 3.848 buah dengan dana mencapai Rp1.002.453.700,00.

Melalui Proyek Pembinaan Swadaya Masyarakat Bidang Perumahan dan Lingkungan telah dilaksanakan pembangunan perumahan rakyat di Propinsi Nusa Tenggara Timur melalui dana APBN sebesar Rp302.000.000,- dengan perincian: tahun anggaran 1978/1979 sebesar Rp9.000.000,-, tahun 1979/1980 sebesar Rp28.000.000,-, tahun 1980/1981 sebesar Rp43.000.000,-, tahun 1981/1982 sebesar Rp71.000.000,- dan tahun anggaran 1982/1983 mencapai Rp151.000.000,-.

Dalam usaha Pembinaan Kesejahteraan Sosial Perumahan Gotong royong telah pula diadakan latihan swadaya sosial masyarakat di bidang pembangunan perumahan gotong royong sebanyak 24 kali di Kabupaten-kabupaten se Propinsi Nusa Tenggara Timur, masing-masing 2 (dua) kali dengan jumlah populasi 692 Kepala Keluarga masing-masing Rp100.000,- per Kepala keluarga. Perincian tiap Kabupaten sejak tahun 1978/1979 sampai dengan 1982/1983 berjumlah Rp6.000.000,-.

Dalam rangka pelaksanaan program Pembinaan Masyarakat Terasing telah pula dilaksanakan pembangunan 754 buah rumah sederhana pemukiman baru kecuali di Kabupaten Flores Timur dan Belu yang masih dalam persiapan.

Usaha penanggulangan akibat bencana alam yang seringkali terjadi di Nusa Tenggara Timur juga telah diberikan bantuan perumahan bagi keluarga korban/penderita, antara lain bagi Kabupaten Flores dan Sikka telah diperoleh pula tambahan dana dari Presiden sebesar Rp59.000.000,- yang diperuntukkan bagi pengadaan peralatan, sumur pompa dan tambahan biaya 400 buah rumah Rp100.000,- per rumah.

Air minum

Dalam Pelita II dan Pelita III di daerah ini telah dilakukan usaha-usaha pengadaan air bersih bagi penduduk daerah pedesaan, melalui berbagai proyek perlindungan air minum yang pembiayaannya berasal dari Inpres Kesehatan dan APBD.

Penanganan air bersih untuk ibu kota Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Pengelola Air Minum (BPAM) dan di kota kecamatan melalui Proyek air bersih ibu kota kecamatan (IKK) dengan pelayanan 60 liter per orang per hari untuk sambungan rumah dan 30 liter per orang per hari untuk kran umum. Satu kran umum diperhitungkan untuk melayani 200 orang atau 20 KK.

Hasil Proyek Air Bersih

Produk akhir dari proyek air bersih, pembentukan Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Pada akhir Pelita II baru satu ibu kota Kabupaten yang disesuaikan pemakaiannya/bentuk BPAM (Kupang), dan tempat ibu kota Kabupaten lainnya masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Sejak awal Pelita III (1978/1979) sampai dengan 1982/1983 dari 12 (dua belas) Proyek Air Bersih yang berada di setiap ibu kota

Tabel / ***Table IV — 11***

DATA KEGIATAN PEMUGARAN PERUMAHAN RAKYAT
DATA OF PUBLIC HOUSING RESTORATION ACTIVITIES

Tahun *Year*	Jumlah Rumah *Total Number of Houses*		Jumlah Biaya *Total cost*	
	APBN *The State's Income and Expenditure Budget*	APBD *The Regional Income and Expenditure Budget*	APBN *The State's Income and Expenditure Budget*	APBD *The Regional Income and Expenditure Budget*
1978/1979	80	—	2.761.000	—
1979/1980	80	—	3.531.000	—
1980/1981	200	50	17.414.000	30.000.000
1981/1982	240	50	17.971.000	30.000.000
1982/1983	240	15	15.360.000	10.000.000

Sumber : Buku Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Tingkat I periode 1978 - 1983.
Source : Report book of the Governor of the province of East Nusa Tenggara about realization of the duty of the regional administration in the period of 1978 - 1983.

The details for each district since 1978/1979 to 1982/1983 totally Rp6,000,000 each.

Within the frame of carrying out the promoting programmes for the primordial tribes, 754 new houses have been conctructed in the new location of resettlment, except in the East Flores district and Belu district, where the programme is still in preparation.

The efforts to overcome the effects of natural disasters which so often occured in the East Nusa Tenggara region, also have been given housing assistancy for the victims, among others for Flores and Sikka districts have been received additional fund from the president of the state as much as Rp59,000,000,- which were destined for equipments, wellpumps construction and additional cost for housing construction for 400 units i.e. Rp100,000 each.

Drinking Water

In the period of Pelita II and Pelita III in this region, efforts have been done for clean water supply for the rural population through various projects of drinking water resources protection of ehich the fund are taken from Helath INPRES (Presidential Instruction) and APBD (Regional Income and Expenditure Budget).

The handling of Clean Water for the district's capital has been arranged by BPAM (Drinking Water Management Body), and in subdistrict capital through Clean Water Project of Sub-district (IKK) with the service of 60 litre/person/day for the house transmission and 30 litre/person/day for the public hydrant. One public hydrant is to be counted to serve 200 persons or 20 families.

Result of Clean Water Project.

The last product of clean water project is the forming of BPAM (Drinking Water Management Body). At the end of Pelita II, just only one capital of the sub-district has applied the BPAM system i.e. Kupang, where 4 other still in the phase of construction. Since the beginning of Pelita III (1978/1979) to 1982/1983, from 12 Clean Water Projects in every district's capital, 7 are laready in function, i.e. under the management of BPAM, while 5 other cities are still in construction, i.e. Atambua (1980), Maumere (1980), Ruteng (1981), Bajawa (1981), Larantuka (1981), Waingapu (1981) and Kupang/Baumata (1977 - 1981 deep well). Capacity of production have been successfully increased from 89 litres/second to become 288 litres/second, wich means that 87 % of the whole requirement for the whole population in the sub-district capital in 1983, i.e. as much as 330 litres/second which is able to supply about 300,000 people.

For the clean water project in sub-district capital, (IKK), 5 capitals projects succeed to be realized and functioning, 8 still under construction and 30 capitals are still under survey.

The supply of clean water in the province of East Nusa Tenggara also have been carried out among others through inhabitation programmes, housing and environment rehabilitation by Rural Development Directorate of the province Administration, and other sectoral projects, including the project of assictancy for natural disasters victims on the disasters' location.

Project of Perumnas (State's Enterprise for National Housing).

The effort of the government to support the people who are living with lower income, in the field of housing construction, are paid attention by the

Kabupaten, tujuh di antaranya telah berfungsi dan disesuaikan/bentuk BPAM. Sedangkan 5 lainnya masih dalam taraf pelaksanaan yakni Atambua (1980), Maumere (1980), Ruteng (1981), Bujawa (1981), Larantuka (1981), Waingapu (1981), Kupang/Baumata (1977/1981/deep weel). Kapasitas produksi berhasil ditingkatkan dari 89 liter per detik menjadi 288 liter per detik ini berarti 87% dari keperluan seluruh penduduk ibu kota Kabupaten pada tahun 1983, yakni sebesar 330 liter per detik, yang dapat melayani ± 300.000 penduduk.

Untuk Proyek Air Bersih di ibu kota Kecamatan (IKK), 5 IKK berhasil diselesaikan dan berfungsi, 8 IKK dalam taraf pembangunan dan 30 IKK telah selesai di survey. Pengadaan Air Bersih di Nusa Tenggara Timur dilaksanakan juga antara lain melalui Program Pemukiman, Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur dan proyek-proyek sektoral lainnya termasuk dalam rangka penyantunan bencana alam di daerah-daerah bencana.

Proyek Perum Perumnas

Usaha Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah di bidang pembangunan rumah juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Pemerintah melalui Perum Perumnas telah membangun rumah sederhana dengan berbagai type yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di 5 (lima) Kabupaten yakni, Kabupaten Kupang, Sikka, Ende, Flores Timur dan Kabupaten Sumba Timur.

Di Kabupaten Kupang telah selesai dibangun 534 unit perumahan type D 36 berlokasi di Kabupaten Oebobo/Pasir Panjang dan kini keseluruhannya telah ditempati. Mengingat permintaan akan perumahan Perumnas terus meningkat, maka Pemerintah Kota Administratif Kupang bersama Perum Perumnas telah menjajagi kemungkinan-kemungkinan membangun sebanyak 1.000 unit type D 36 yang berlokasi di Kelurahan Nunbaun Sabu/Namosain Kupang.

Di Kabupaten Sikka (desa Kabor Maumere) telah dibangun sebanyak 444 unit Perumnas type D 36, sedang di desa Weni Larantuka telah dibangun 250 unit type D 20 dan 60 (enam puluh) unit di desa Hambala Waingapu dengan perincian type T 36/200 sejumlah 36 (tiga puluh enam) unit, type T 54/200 sebanyak 24 (dua puluh empat) unit. Sedangkan untuk Kabupaten Ende baru dipersiapkan tanah seluas 5,5 Ha di desa Mautapaga untuk dibangun rumah Perumnas.

7. Lingkungan Hidup

Kegiatan penghijauan dan reboisasi di wilayah Nusa Tenggara Timur mempunyai sasaran ganda, yaitu untuk rehabilitasi tanah-tanah kritis yang berpengaruh pada produktivitas lahan usaha, disamping usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Wilayah NTT mempunyai luas daratan 4.987.998 Ha, sejak awal pelaksanaan program penghijauan dan reboisasi diinventarisir sekitar 1.920.028 Ha atau 38% dari seluruh luas wilayah sebagai daerah kritis. Lihat Tabel IV-12.

Pemulihan Tanah Kritis

Pelaksanaan Program Inpres Penghijauan dan Reboisasi hingga tahun 1982/1983, dengan target penanaman baru meliputi 6% dan 8% yaitu untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi. Tingkat keberhasilan kegiatan penghijauan 50% dan reboisasi 70% di setiap tahun anggaran.

Operasi Nusa Hijau

Sejak dua tahun terakhir ini (mulai tahun anggaran 1981/1982) dengan bantuan Dana BANPRES yang ditunjang pula dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Daerah Tingkat I dilaksanakan usaha Penghijauan Massal yang dikaitkan dengan perluasan tanaman keras, buah-buahan atau makanan ternak berupa kegiatan OPERASI NUSA HIJAU (ONH).

Gagasan Operasi Nusa Hijau ini timbul didasarkan bahwa di lingkungan pemukiman penduduk di tanah-tanah ladang menetap petani perlu pula perlindungan bahwa bahaya erosi disamping divertifikasi hasil produksi usaha taninya, begitu tanah-tanah pekarangan atau tanah-tanah desa yang kosong/kritis yang tersebar dalam luasan yang kecil-kecil.

Kegiatan Operasi Nusa Hijau tersebut berupa penyediaan bibit/benih dan bimbingan teknik bagi masyarakat untuk pengembangan tanaman kelapa, kopi, cengkeh, coklat, kemiri, lamtoro gung, jambu mete, nangka, jeruk dan lain-lain, yang ditanam sendiri oleh rakyat/petani pada tanah-tanah usaha taninya atau tanah-tanah desa yang kosong/kritis, tanah pekarangan dan sebagainya. Sejauh kegiatan

regional administration. The government through Perum Perumnas had constructed various types of simple house for Puny Economic Groups in 5 districts i.e. Kupang, Sikka, Ende, East Flores and East Sumba. In Kupang district there are constructed as much as 534 units type D 36 in the location of Gebobo/Pasir Panjang and nowadays fully in habitated already. Considering that the demands on Perumnas housing are still increasing the city administration of Kupang together with Perum Perumnas have surveted possibilities to construct as much as 1000 units in D.36 type in the location of Nunbaun kelurahan, Sabu/Kamosain, Kupang.

In the district of Sikka, the village of Kabor Maumere, 444 units D 36 type have been constructed by Perumnas, while in Weni village of Larantuka, total construction of D 20 type were 250 units and in the village of Hambala in Waingapu have been constructed 60 units: in T 36 type 36 units and in T 54/200 type 24 units. For subdistrict of Ende have been prepared 5.5 Ha land located at the village of Mautapaga, for Perumnas Construction.

7. *Living Environment*

Activities of regreening and reforestation in the region of the East Nusa Tenggara are in the possession of two double goals i.e. to rehabilitate critical areas which are influencing factors to the land's productivity and to improve the people's living standard. The region of East Nusa Tenggara as large as 4,987,998 Ha. Since the beginning of the programme of regreening and reforestation have been inventorized about 1,920,028 Ha critical area, or as much as 38 % from the whole province area. See Table IV - 12

Tabel / *Table IV — 12*

DAFTAR PENYERAPAN LUAS TANAH KRITIS DI WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1981/1982
TABLE OF DISTRIBUTION AND TOTAL AREA OF CRITICAL SOIL IN THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

Kabupaten *District*	Luas Daratan (Ha) *Area of the soil*	Luas Kawasan Kritis *Area of the critical soil*: Diluar Kawasan Hutan (Ha) *Outside the forest area*	Luas Kawasan Kritis *Area of the critical soil*: Didalam Kawasan Hutan (Ha) *Inside the forest area*	Jumlah Kawasan Kritis *Total area of the critical soil*
01. Kupang	783.020	148.600	80.170	228.770
02. Timor Tengah Sel	433.340	174.260	86.170	260.430
03. Timor Tengah Ut	304.430	101.960	18.475	120.435
04. Belu	236.110	66.680	14.385	81.065
05. Alor	291.590	196.970	30.770	227.740
06. Sikka	166.790	139.695	19.540	159.235
07. Flores Timur	312.270	76.400	15.395	91.795
08. Ende	243.575	70.900	18.870	89.770
09. Manggarai	710.508	49.300	15.640	65.020
10. Ngada	276.545	205.990	69.530	275.520
11. Sumba Timyt	771.090	59.203	28.640	87.843
12. Sumba Barat	458.730	157.190	75.215	232.405
Nusa Tenggara Timur/ *East Nusa Tenggara*	4.987.998	1.447.228	472.800	1,920.028

Rehabilitation of Critical Soil

The realization of INPRES (Presidential Intruction) programme of regreening and reforestation until 1982/1983 reached 6 % and 8 %, and the degree of achievment in every budgeting year averagingly about 50 % in regreening and 70 % in reforestation.

Green Nusa Operation

Beginning from 1981/1982 with the assistancy of BANPRES (Presidential aid) fund which was also supported by APBD for the province of East Nusa Tenggara, have been realized mass regreening actions, which have been tied with enlargement of hardplant areas, fruit plant or cattle ffod plants, in the form of Green Nusa Operation

the idea of Green Nusa Operation (ONH) emerged due to the fact that the people living as peasants ought to be protected from the danger of erosion, besides carrying out a diversification of their cultivation products, also to regreen the critical soils in the villages area spreading in small squares.

Activities of ONH mentioned above in the form of the supply of seeds and technical guidance for the people to increase coconut plants, coffee, cloves, chocolate, candlenut, Lamtoro gung (sclanaceac), cashew nut, anacardium occidentale, artocarpus integrifolia, orange etc, which are planted by the peasants themselves in theor own fields or village's empty or critical soils, house's yards and so on. So far concerning the activity, have been given seeds

disebarkan bibit/benih tanaman untuk :

- Tanaman kelapa	=	100.000 buah.
- Jambu meten	=	12.000 kg.
- Kopi	=	500 kg.
- Kemiri	=	8.000 kg.
- Coklat	=	100.000 anakan.
- Lamtoro Gung	=	1.800 kg.

Dengan demikian kegiatan ini di satu segi dapat merupakan usaha diversifikasi tanaman usaha tani rakyat yang dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan, tetapi secara umum hasilnya akan membantu pemulihan vegetasi dan perbaikan hidup.

Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Usaha Tani Terpadu

Pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Usaha Tani Terpadu di Nusa Tenggara Timur melalui bantuan Konsultan Bank Dunia dengan PPIPD, Pemerintah Daerah telah menetapkan adanya 13 satuan Wilayah Pengembangan yang tersebar di Pulau Timor, Flores, dan Sumba, yaitu berupa dataran-dataran potensial untuk pengembangan berbagai usaha pertanian dan industri. Oleh karena itu pada beberapa DAS penting yang mempengaruhi perkembangan daerah-daerah dataran yang berada dalam tanah kritis diusulkan untuk secepatnya diadakan penghijauan dengan bantuan dana luar negeri.
Sejauh ini sudah ada kesanggupan donor untuk mengadakan penghijauan besar-besaran dengan tanaman yang cepat tumbuh terutama lamtoro gung, kemudian disusul dengan usaha ternak ikat dan kemudian pengembangan pertanian umum di daerah.

Sebagai langkah pertama mulai tahun anggaran 1983/1984 pada tiga buah Daerah Aliran Sungai (DAS) penting yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) OESAO, Daerah Aliran Sungai MUKE dan Daerah Aliran Sungai LEMBOR yang mempengaruhi SWP-OEsao, SWP Bena dan SWP-Lembor akan dimulai kegiatan penanaman Gung, masing-masing seluas 2.000 Ha. DAS OEsao dan DAS Muke 1.500 Ha, DAS Lembor 1.000 Ha.

Penghijauan Massal Swadaya

Pada setiap tahun sejalan dengan pelaksanaan Pekan Penghijauan Nasional, di daerah-daerah/kabupaten mengadakan kegiatan monumen hidup berupa penanaman tanah kosong/kritis dengan berbagai tanaman minimum 20 Ha, dimana bibit disediakan sendiri oleh masyarakat. Peserta yang terdiri dari pegawai, anak sekolah/pramuka, ABRI dan masyarakat umum.

Untuk kegiatan di tingkat desa juga dilakukan kegiatan yang sama dengan sekedar dana bantuan Pemerintah Daerah untuk pembelian benih/bibit, yang dalam kenyataannya sebagian besar pelaksanaannya adalah pengerahan dana swadaya masyarakat. Juga diaktifkan pengadaan kebun-kebun sekolah. Lomba pengadaan benih dan penanaman penghijauan dengan rangsangan hadiah sekedarnya dari Pemerintah Daerah.

8. Hukum dan Kamtibmas

Strategi pembangunan bidang hukum di Nusa Tenggara Timur sejalan dengan strategi pembangunan hukum Nasional. Tindak lanjut penerapan pola pembangunan di bidang ini ialah diletakkannya langkah dan kebijaksanaan yang tertuang dalam program sebagai berikut : Program Pembinaan Peradilan dan penegakkan hukum; Pembinaan tertib hukum; penyelidikan hukum; penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintah di bidang hukum serta program penyempurnaan prasarana fisik pemerintah dalam bidang hukum melalui program aparatur negara.

Pembinaan Peradilan

Pembinaan peradilan dikaitkan dengan fungsi gubernur sebagai aparat dekonsentrasi, yaitu dalam hal mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas lembaga peradilan di bawah Departemen Kehakiman. Meliputi fungsi teknis berupa: bidang hukum, dan peradilan umum, bidang pemasyarakatan dan bidang imigrasi.

Bidang hukum dan peradilan umum

Dalam rangka pembangunan hukum sesuai dengan GBHN, maka berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 1978 dibentuk pengadilan Kupang yang wilayah hukumnya meliputi Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Sebelumnya kedua wilayah ini termasuk dalam wilayah hukum (yuridis) Pengadilan Negeri Denpasar.

Dari tahun 1978 (Pelita II) sampai dengan tahun 1983 (Pelita III) sudah banyak dihasilkan peraturan-peraturan sebagai berikut;

a. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 86 buah.
b. Keputusan Gubernur sebanyak 861 buah.
c. Instruksi Gubernur sebanyak 30 buah.

as much as :

- *Coconut plants = 100,000,- anacardium accidentale = 12,000 kg.*
- *Coffee 500 kg, Candlenut = 8,000 kg, Chocolate = 100,000 sprouts, and Lamtoro Gung = 1.800 kg.*

Then it is clear that this activity in one point can be outlined as an effort for diversification of the people's plantation products to increase their living standar (income) but in general the result will support the regreening and reforestation programmes, to rehabilitate the living environment.

Improvement of River Catchment Area (DAS) and Integrated Farming Efforts

Improvement of watershed areas and integrated farming efforts in the East Nusa Tenggara through the aid of the World Bank Consult and together with PPIPD of the province administration has already decided the existence of 13 units of improvement areas, spreading on the island of Timor, island of Flores and Sumba, i.e. in the form of potential landscapes for the developent of various agricultural and industrial purposes. Because i of it for several improvement DAS affecting the plain areas, which exist as critical areas are proposed to be improve sooner with regreening programmes, funded by foreign aids.

So far there have been some donators showing attention and are willing to realize a large scale of regreening with a fast growing hardpalnts expecially lamtoro gung, then followed by cattle breeding and development of public farming.

As the first step since 1983/1984 in three DAS areas considered to be important i.e. DAS OESAO, DAS MUKE, and DAS LEMBOR which are affecting SWP OESAO, SWP BENA and SWP LEMBOR are starting with the activities of Lamtoro Gung planting, in the area of 2,000 Ha in DAS OESAO, 1,500 Ha in DAS MUKE and 1,000 Ha in DAS LEMBOR.

Selfsupporting Mass Regreening

In every year in accordance with the Week of National Regreening, in every district have been carried out activities of life monument in the form of planting of empty and critical land with various plants, with the area minimal of 20 Ha for each district, where the seeds are supplied by the people themselves. Participants comprising officials, school boys/boyscouts, military men and the people in general.

In the village level also have been carried out the same activities under a smaller amount of assistance fund from the regional administration for the seeds purchase, but in fact the greater expences came from the people's own self supporting funds.

Also have been activated the planting of school's gardens, competitions of seeds supply and regreening plantings with a sufficient rewards stimulation from the regional administration.

8. Legal Affair and Social Order

Regional strategy in the development of Legal Affair in the province of East Nusa Tenggara have been carried out in accordance with the national legal affair development strategy. The next step taken in the realization of the development design in this field is that the policy and steps taken in the form of programme such as folows :

The programmes of Judiciary Guidance and Law Enforcement; Promoting of Social Order; Law Investigation; Improvement of the legal affair apparatus working efficiency and programme of the physical facilities in the field of legal affair improvement through the programmes of state's apparatus.

Judiciary Promoting

Judiciary promoting associated with the function of the governor as a deconsentration apparatus ie. in the sense of coordination of the whole duties of judiciary institutions which are under the management of the Department of Justice, covering the field of technic such as : public judiciary, imprisonment and immigration.

Legal Affairs and Public Judiciary

Within the frame of legal affairs development according to GBHN (guidlines of the State's Policy), then base on the Law No 6 of 1978, the Kupang court of Justice had been set up with its juridiction area covering the whole East Nusa Tenggara province and the province of Timor Timur. Before in the two provinces were under the juridiction of the Denpasar Court of Justice.

From the year of 1978 (Pelita II) until the year of 1983 (Pelita III) had been issued regulations such as :

a. Regional Regulations of the East Nusa Tenggara totally 66.
b. Governor's decisions 861.
c. Governor's Instruction totally 30.

d. Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II sebanyak 591 buah.
e. Penolakan Peraturan Daerah Tingkat II sebanyak 29 buah.
f. Meneruskan Peraturan Daerah Tingkat I untuk mendapatkan penegasan sebanyak 86 buah dengan perincian sebagai berikut: 70 buah telah disahkan Mendagri, 6 buah ditolak dan 12 buah sementara dalam proses pengesahan.
g. Meneruskan peraturan daerah Tingkat II kepada Mendagri untuk disahkan sebanyak 281 buah dengan perincian: 87 buah mendapat pengesahan, 11 buah ditolak dan 21 buah dalam proses.

Bidang pemasyarakatan

Kegiatan di bidang ini di Nusa Tenggara Timur terutama diarahkan untuk memonitor perkembangan kriminilitas, isi lembaga pemasyarakatan dan jumlah narapidana serta berbagai kegiatan pembinaan dan kebijaksanaan dalam pengurangan masa hukuman para narapidana.

Pemberian bantuan hukum

Salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah pemberian pertimbangan hukum/bantuan hukum. Baik kepada aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah hukum di daerah ini. Dalam Pelita II dan Pelita III telah diberikan bantuan hukum ke masyarakat dan aparatur pemerintah bagi 61 orang. Dengan perincian sebagai berikut: Dalam tahun 1978 bantuan hukum diberikan kepada 8 orang, tahun 1979 terhadap 7 orang, tahun 1980 untuk 8 orang, dan dalam tahun 1981 sampai tahun 1982 berturut-turut 16 dan 22 orang. Kegiatan lain yang cukup menonjol di bidang bantuan hukum antara lain menyangkut pengadaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan badan-badan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Khususnya dalam menginventarisir data perkara pidana, perdata maupun lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai tindak lanjut dari pada pendirian Pengadilan Tinggi Kupang, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dalam bentuk sarana fisik maupun non fisik, yang sudah dimulai sejak tahun 1977 yang meliputi:

Pembangunan fisik

a. Gedung perkantoran yang telah selesai dibangun yaitu: Pengadilan Negeri Soe, Atambua, Maumere, Ruteng, Waikabubak, Kefamenanu dan Kalabahi. Dilaksanakan pula pembangunan berbagai gedung seperti : Pengadilan Negeri Kupang, Larantuka, Ende, Ngada dan Waingapu.
b. Pembangunan 31 buah tempat sidang Pengadilan Negeri. Dari jumlah tersebut 19 buah tempat sidang telah selesai dan sisanya dalam proses pembangunan.
c. Pembangunan rumah dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, para Hakim dan Panitera dengan type B dan C. Secara keseluruhan kegiatan yang menyangkut pembangunan proyek fisik kemudian dialihkan dan ditangani secara langsung oleh Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan di satu pihak, sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur Peradilan sebagai upaya meningkatkan mutu dan profesionalisme para penegak hukum.

Pembangunan non fisik

Di bidang pembangunan non fisik telah diadakan berbagai kegiatan penelitian hukum adat di wilayah Nusa Tenggara Timur sebagai upaya dalam menunjang pembentukan satu hukum Nasional. Penelitian dimaksud sebagai upaya untuk mendukung dan memotivasi para hakim dalam mengambil keputusan.

Khusus dalam rangka merealisir upaya pemerataan dalam memperoleh keadilan maka telah disediakan dana bagi para terdakwa dalam perkara pidana bagi yang kurang mampu dalam membela haknya.

Jumlah narapidana

Mengenai jumlah tahanan/narapidana sejak Pelita II hingga Pelita III adalah sebagai berikut:
Dalam tahun 1978 sebanyak 1.113 orang; tahun 1979 sebanyak 1.189; tahun 1980 sebanyak 971 orang; tahun 1981 sebanyak 1.044 orang dan dalam tahun 1982 sebanyak 465 narapidana. Lihat Tabel IV-13.

Tunggakan tahanan pada akhir tahun 1977	119
Tahanan masuk pada 1978 - 1982	4.511
J u m l a h	4.630
Tahanan yang diselesaikan tahun 1978 - 1982	4.623
Sisa akhir tahun 1982:	7

d. Legalization of district regional regulations totally 591.
e. Refusion of district regional regulation 29.
f. To continue the provincial regional regulation for legalization as many as 66 with details as: 70 had been legalized, 6 refused and 12 more are still under process of legalization.
g. To continue the district regional regulation to the Ministry of Home Affairs for legalization totally 281 with details of 87 have been legalized, 11 refused and 21 under process.

Legal Aids

One of the activities in relationship with law enforcement is about legal consults/legal aids, either for the people or for the government apparatus facing court problems in this region. In the period of Pelita II and Pelita III, such as aid has been given for 8 person, (1978), in 1979 for 7 persons, 1980 for 8 persons and 1981 for 16 with 1982 for 22 person.

Other activities notable in this legal affairs assistancy among others concerning coordination and mutual corporation with judiciary bodies in the East Nusa Tenggara region. In particular concerning inventories of criminal cases, civil cases or imprisonment institution.

As a continuous step of the setting up of the Kupang Appelate Court, have been cariied out various development activities such as in the form of physical and non physical facilities improvement, which have been realized since 1977, covering :

Physical Facilities Construction

a. Offices of Soe Court of Justice, Atambua Court of Justice, Maumere, Ruteng, Waikabubak, Kefamenanu and Kalabahi Court of Justice. Also have been constructed various additional buildings such as in Kupang Court of Justice, Larantuka, Ende, Ngada and Waingapu.
b. Construction of 31 courtrooms of the Court of Justice, where 19 are already finished and the rest are still under construction.
c. Construction of official houses for the Chief, Vice and Judges and Court Secretary in B and C types.

As a whole all of the activities relating to physyical construction have been moved to be handed by the Regional Office of the Department of Justice. All of the activities carried out are purposedly to increase the welfare of judiciary apparatus in other side, in the efforts to improve the quality and professionalism of the legal affair apparatus.

Non Physical Development

It have been carried out several researches on traditional law in the East Nusa Tenggara region in the effort to support the creation of national law. Also the research has been conducted in the purpose to help and to motivate the judges in their court decisions.

Particularly in the effort to equalize the gaining of righteousness, a fund was prepared for the accused who are in the lower income level in their criminal accusation, so they can be able to defend their cases.

The Field of Imprisonment

Activities in this field in the East Nusa Tenggara are especially directed to monitoring the crime development, the number of prisons, the number of prisoners and various promoting activities and policies in the reduction of imprisonment sentences for the prisoners.

Total number of prisoners.

The total number of prisoners/criminals since Pelita II until Pelita III were as follows : in 1978 totally 1,113 persons, 1979 were 1,189 persons, in 1980 were 971 persons, 1981 were 1,004 persons and in 1982 they were totally 465 prisoners. See Table IV - 13.

— The accused remnants at the end of 1977 = 119 persons
— The Imprisoned in the period of 1978 to 1982 = 4,511 persons
Total = 4,630 persons. Cases have been sentenced in the period of 1978 to 1982 = 4,623 cases.

Setting Up Casses.

Cases settled up in the Appelate Courts of Kupang from 1979 to 1982 are cited as follows: 1979 totally 49 cases under decisions, 1980 totally 50 cases, 1981 67 cases and until December of 1982 had been decided 98 cases. See Table IV - 14.

Besides it, for the prisoners also have been given mental/spiritual guidance, such as P4 upgrading and religious teaching, for the purpose to amke come

Tabel / *Table IV — 13*

JUMLAH TAHANAN SEJAK TAHUN 1978 S/D TAHUN 1982 :
TOTAL NUMBER OF PRISONERS

Tahun *Year*	Sisa *Remnants*	Masuk *Imprisoned*	Jumlah *Total*	Diselesaikan *Sentenced*
1978	119	994	1.113	1.094
1979	19	1.170	1.189	1.132
1980	59	914	971	901
1981	70	974	1.044	1.038
1982	6	459	465	458

Penyelesaian perkara

Sementara untuk penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Tinggi Kupang dari tahun 1979 - 1982 adalah tahun 1979 diputus 42 perkara; tahun 1980 diputus 50 perkara; tahun 1981 diputus 67 perkara dan sampai Desember 1982 diputus 98 perkara. Lihat Tabel IV-14.

Selain itu untuk para narapidana juga diberikan pembinaan mental spritual, seperti penataran P4 dan keagamaan, maksudnya agar para terhukum yang telah kembali ke masyarakat dapat hidup lebih tenang, tenteram dan dapat menjauhi hal-hal yang bersifat negatif.

Bidang imigrasi

Kegiatan di bidang ini terutama diarahkan untuk pengawasan lalu-lintas orang asing serta pengawasan orang asing yang berada di Nusa Tenggara Timur. Hambatan yang paling dirasakan adalah karena luas wilayah dan situasi geografis Nusa Tenggara Timur cukup sulit. Kondisi ini nyaris menimbulkan hambatan pada kelancaran tugas pembinaan. Namun demikian melalui koordinasi dan tanggung jawab serta partisipasi aktif dari berbagai aparat hukum, kegiatan Keimigrasian dapat berjalan tanpa ada hambatan berarti.

9. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam mensukseskan program pemerintah adalah dengan memanfaatkan sarana penerangan, pers, mass media, radio dan televisi serta komunikasi lainnya.

Semua sarana itu merupakan penyalur informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat serta meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Sedang kegiatan operasional penerangan di Nusa Tenggara Timur yang menjadi latar belakang masalah adalah kultur masyarakat, latar belakang pendidikan dan belum berfungsinya lembaga-lembaga sosial desa.

Untuk itu kegiatan penerangan, pers, mass media, radio, televisi dan komunikasi lainnya terus disebarkan ke segala pelosok desa. Baik secara langsung/tatap muka maupun melalui penerangan tulisan/gambar. Dengan menerbitkan majalah, buletin dan poster dinding.

Program penerangan dan komunikasi sosial dalam pelaksanaannya mendapat penekanan-penekanan khusus. Penekanan itu adalah: a) program pengembangan operasi penerangan b) program pengembangan sarana radio, televisi dan film serta pengembangan pers/mass media. c) program penunjang terhadap program penerangan dan komunikasi sosial.

Paket Penerangan

Bantuan pemerintah dalam pengembangan penerangan di Nusa Tenggara Timur adalah dalam bentuk 11 buah paket penerangan. Ini sesuai Instruksi Dirjen Penum No 09/Inst/Dirjen Penum/1979 tentang pokok-pokok penerangan dengan cakupan;

a. Pembudayaan P4, UUD dan GBHN.
b. Peningkatan Produksi Pangan.
c. Kependudukan dan Kelestarian Lingkungan.
d. Pembinaan Generasi Muda dan Peningkatan Peranan Wanita.
e. Pelaksanaan INPRES No 6 Tahun 1971.
f. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
g. Pemantapan Pembangunan Timor Timur.
h. Memasyarakatkan ASEAN.
i. Masalah Luar Negeri.
j. Pemilihan Umum Tahun 1982.
k. Lain-lain Tema Penerangan Khusus Penunjang Penyuluhan.

Kegiatan Penerangan Umum

Kegiatan Penerangan Umum di Nusa Tenggara Timur dititikberatkan pada kebijaksanaan pokok penerangan, yaitu kegiatan

Tabel / *Table IV — 14*

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN TINGGI KUPANG
(1979 — 1982)
CRIMINAL CASES SETTLED UP IN THE APPELATE COURT OF KUPANG

No Jenis Perkara *Kind of Case*	Tahun *Year*	Pelimpahan *Additional*: Tahun Sebelum *Year Before*	Masuk *Imprisoned*	Jumlah *Total*	Diputus *Sentenced*	Sisa Tunggakan *Remnant Cases*
Pidana/	1979	31	43	74	42	32
Criminal	1980	32	36	68	50	18
	1981	18	85	103	67	36
	Des 1982	36	72	108	98	10

Sumber : Pengadilan Tinggi Kupang / ***The Appelate Court of Kupang***

back prisoners be able to live peacefully when they already be bakc to the people again, to be away from negative lives.

Immigration Field

Activities in this field are mainly directed to control foreign ers traffics and foreigner living in the East Nusa Tenggara. Obstacles apper mostly because of the broadarea of the region and its difficult geographycal condition. This condition almost creates constrains in the fluency of the task of promoting, but by coordination, responsibility and active participation from various legal affairs apparatus, then immigration work can be carried out without any significant obstacle.

9. Information, Press and Social Communication

One of the endeavours to increase the people's participation in the province of the East Nusa Tenggara in the relationship with the successfulness of the government programmes is by utilization of information facilities such as press, mass medias, radios and televisions and other communication tools.

All of the facilities mentioned are objective information channels, able to make constructive social constrol through which, and channeling of the people's aspiration and to extensify communication and people's participation.

In the case of information operational activities in the province of Nusa Tenggara, the background of the main problems among others are the society's culture, the people's educational background and the disfuntion of the rural's social institutions.

For these reasons the information activities through press, mass medias, radios, televisions and other communications tools have been continually spread to all rural areas, either by direct face to face method or through writing and picturing information, i.e. by publication of magazines, bulletins oe wall posters.

Programmes of information and social communication in their realization are heavily emphasized such as follows : a) Programmes of information operation development. b) Development of programmes on radio, television and film and the development of press and mass media. c) Supporting programmes for information and social communication programmes.

Information Package

The government aid in the development of information sector in the province of East Nusa Tenggara was in the form of 11 information packages. This was in accordance with the Director General of Public Information instruction No 09/Int/Dirjen Penum/1979 about the information main points, covering :

a. Culturalization of P4, Constitution of 45 and the Guidelines of the State's policy.
b. Increasing of food production.
c. Population and Environmental Safety.
d. Promoting of Younger Generation and improvement of Women's role.
e. Realization of INPRES No 6 of 1971.
f. Indonesian Archipelagic Concept and National Resilience.
g. Intensifying of East Timor development.
h. The popularization of ASEAN.
i. Foreign problems.
j. 1982 General Elections
k. Other themes of special information in supporting of guidance and information.

Activities of Public Information

The activities of public information in the province of East Nusa Tenggara are emphasized to the information principles policies i.e. information activities

penerangan yang dilaksanakan sebagai komunikasi sosial dan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat. Kebijaksanaan ini ditingkatkan mengingat sikap di kalangan masyarakat pedesaan, sikap untuk berkomunikasi secara dialog dengan pemerintah belum melembaga.

Secara berangsur-angsur diambil langkah-langkah untuk menetapkan kesediaan dan kemampuan masyarakat menerima serta menyerap informasi secara timbal balik.

Untuk tujuan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan penerangan baik melalui sarasehan, pemutaran film, siaran radio, pertunjukan rakyat maupun kegiatan pameran. Sejak April hingga November 1982 kegiatan pemutaran film penerangan mencapai jumlah frekuensi 847 kali, melibatkan audience 1.502.080 orang, penerangan radio 540 kali, pameran 355 kali, pertunjukan rakyat 255 kali, ceramah 444 kali dengan peserta 187.943, penerbitan brosur 361 kali dengan jumlah oplah mencapai 158.482, kampanye penerangan 321 kali, jumpa pers 7 kali dan kegiatan anjangsana sebanyak 28 kali.

Khusus kegiatan penerangan untuk mensukseskan Program Operasi Nusa Makmur yang telah dilaksanakan meliputi tugas-tugas sebagai berikut: Sarasehan sebanyak 498 kali, pertunjukan rakyat 76 kali, pameran 92 kali dan penerangan melalui radio sebanyak 200 kali. Kegiatan ini juga meliputi penerangan mengenai Pengembalian Tunggakan Kredit sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1981. Ini dilaksanakan oleh semua unit/jajaran Departemen Penerangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Khusus penerbitan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Nusa Tenggara Timur periode terbitannya bermacam-macam. Mulai dari mingguan, tengah bulanan, bulanan maupun penerbitan yang bersifat insidentil. Mingguan "Duta" misalnya, terbit sekali seminggu dengan oplah 750 eksemplar, "Media Komunikasi" terbit bulanan dengan oplah 200 eksemplar dan banyak lagi penerbitan-penerbitan insidentil lainnya. Secara keseluruhan penerbitan yang dikelola oleh instansi ini berjumlah 34 buah.

Radio dan Televisi

RRI Regional I Kupang dalam menyelenggarakan siarannya berpedoman pada kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direktorat Radio sesuai dengan Pedoman Pelita III yang meliputi:

- Siaran Berita dan Penerangan	: 25%
- Siaran Pendidikan	: 20%
- Siaran Kebudayaan	: 20%
- Siaran Hiburan	: 30% dan
- Siaran Lain-lain	; 5%

Secara keseluruhan, kebijaksanaan tersebut telah berjalan tanpa ada hambatan yang berarti. Bahkan mulai tahun anggaran 1978 hingga kini prosentase jenis siaran telah lebih ditingkatkan lagi. Siaran Berita dan Penerangan misalnya, semula hanya 25% meningkat menjadi 39,04%, siaran Pendidikan dari 20% menjadi 29,72%, dan Siaran Kebudayaan menjadi 6,66%.

Disamping penambahan prosentase jenis siaran, mulai tahun 1978 pun telah diadakan penambahan bagi jam siaran. Peningkatan jam siaran tersebut dilaksanakan mengingat makin meningkatnya kegiatan di berbagai bidang pembangunan. Sejak tahun 1978 hingga tahun 1983 telah disiarkan ± 25.790 item berita yang menyangkut masalah politik, pemerintahan, ekonomi keuangan, sosial budaya, agama, olah raga dan hukum: 222 kali wawancara, 216 kali laporan Ulangan dan 86 kali siaran langsung/reportase, telah diadakan siaran khusus Operasi Nusa Makmur dan Operasi Nusa Hijau. Dalam kaitannya dengan kegiatan Pemilu dan Sidang Umum MPR telah diadakan kegiatan dalam bentuk siaran Khusus dalam slide dan sebagainya.

Dalam rangka pemerataan informasi, telah diselenggarakan pula pengadaan televisi umum. Pada tahun 1982 jumlahnya mencapai 455 unit, yang terdiri dari Hitam Putih 407 unit dan Berwarna 48 unit.

Siaran Pendidikan

Khusus kegiatan siaran pendidikan, telah diadakan beberapa cara yang diarahkan pada penerangan masyarakat pembudayaan dan pelestarian P4, GBHN, UUD 1945, Repelita Nasional dan Program Kerja Pemerintah Daerah meliputi: Cerdas Cermat, Siaran Pemerintah Daerah, Siaran Pedesaan, Siaran Wanita dan Pembangunan, obrolan serta mimbar Agama.

Disamping kegiatan penerangan melalui radio, masih ada lagi kegiatan penerangan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu melalui televisi. Kegiatan ini antara lain mencatat semua perkembangan, keinginan maupun pengaruh sebagai akibat adanya Siaran Televisi di Indonesia. Dalam mendukung program Departemen Penerangan, yaitu menyebarluaskan informasi secara cepat dan aktual melalui media televisi, maka pada tahun 1982 telah disebarluaskan 166 buah televisi.

which are carried out as a social communication and mutual communication between the government and the people and among the people themselves. This policy was improved due to the attitude of the rural people, an attitude to conduct as dialoque with the government is not yet institution alized.

Gradually steps have been taken to strenghten the people's capability to receive and to absorb information on mutual system. And for this purpose activities of information have been done in the form of workshops, film performances, radio programmes, folk performances or exhibitions activities. Since April to November of 1982, film operations on information reached the frequency of 847 times, covered audinces as much as 1,502,080 persons; information by radio programmes totally 540 times; exhibitions 355, folk performances 255, seminars 444 wi th total participants of 187,943; brochures publication 361 with total copies of 158, 482; information campaigns 321 times, press meetings 7 times and visiting activities 28 times.

To secced the operations of Prosper Nusa Operation (ONM) in particular information policy have been realized covering duties such as: workshops 498 times; folk performances 76; exhibitions 92; radio informations 200 times. These activities also are covering the issue about the paying back of credit according to the presidential Instruction No 10 of 1981. All of these activities are carried out by all units and hierarchy in the Regional Office of the Department of Information of the province of East Nusa Tenggara.

In case of publication managed by the regional office of the Department of Information, there are various periodical have been issued such as weekly, bimothly, monthly or incidental publication. The Duta Weekly for instance is published once a week with 750 copies, Media Komunikasi issued monthly with 200 copies and many other publications. Totally the whole publication of this regional office of the Department in Information enumbered to 34 issues.

Radio and Television

RRI Regional I Kupang in its programmes is guided by the policy outlined by the Directorate of Radio according to the Pelita III Guidance, covering : News and Information programmes 25 %, Education 20 %, Cultural 20 %, Entertainment 30 % and other packages 5 %.

In general all of the policies have been running well without any notable difficulty. Even beginning from the budget year of 1978 to the present days, the persentage of programme's diversification have been increased, such as for the News and Information packages, from 25 % at first already becomes 39.04 %, Education packages from 20 % to 29.72 % and cultural broadcasts to 6.66 %.

Besides such percentage increasing, since 1978 also has been added the hours of broadcastings. The increasing activities of information due to the acceleration of development in every field. Since 1978 to 1983 about 25,790 news items have been broadcast involving politics, state's administration, economic and finance, social-culture, religion, sports and legal affairs with 222 times of interviews, 216 repeating reports and 86 times of direct reporting. Besides that also the special programmes on Prosper of Nusa Operation (ONM) and Green Nusa Operation (ONH) have been carried out, and special programmes again in the relationship with the General Election and MPR (People's General Assembly) General Meeting, in the form of special programme in slide and so on.

In the relation of equitable information,it has been realized installation of public television, where in 1982 reached to 455 units consisting of Balck and White units (407) and Colour 48 units.

Education Programme

In the field of Education Programme in particular some methods have been done destined to social information, the aculturation of P4, the Guidelines of The State's Policy, The Constitution of 45, National Five Years Development programme and the Working Programme of the Regional Administration, covering : Quiz, regional administration programmes, rural programmes, women and development, discussion and religion froum.

Besides such radio programmes, there still exist another media which is not in less important i.e. television. This activity among other by citing of all development, desire and influence caused by the existence of Television Programme in Indonesia. In supporting the programmes of Information Department i.e. to spread out informations quickly and actually through television media, in 1978 have been distributed totally 166 television units.

Film Promoting

The policy line in promoting and improving of national films as decided by National films Board is cultural educative , where invilved three aspects : first, relating to mechanic improvement in equipments and technology; secondly, relating to the film production development as industry and thirdly, relating to the improvement of films as a dramatic expression media.

Pembinaan Perfilman

Garis kebijaksanaan bidang pembinaan dan pengembangan perfilman nasional sebagaimana diputuskan oleh Dewan Film Nasional adalah "kultural edukatif", dimana menyangkut tiga aspek. Pertama menyangkut kemajuan mekanis dalam bidang peralatan dan teknologi; kedua, menyangkut pertumbuhan film sebagai industri dan ketiga, menyangkut perkembangan film sebagai alat pengutaraan dramatis.

Ketiga aspek perkembangan film ini telah menjadikan film untuk memiliki bahasa tersendiri dan kedudukan sebagai medium komunikasi yang ampuh. Pada pihak lain, penerangan sebagai hiburan memberikan padanya fungsi sosial. Artinya, film membawa informasi, memiliki kesanggupan untuk mempengaruhi selera; sikap-sikap, nilai-nilai, pengertian dan kesadaran manusia mengenai dirinya serta masyarakat bangsanya dan arti kehidupan, baik dalam arti positif maupun negatif.

Bertitik tolak dari kebijaksanaan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Bapfida Nusa Tenggara Timur secara terpadu dan terus menerus mengadakan pengawasan serta pengamatan film-film komersil di gedung-gedung bioskop di wilayah ini. Ini menjadi berasalan mengingat bahwa fungsi film pada umumnya bukan sekedar alat hiburan, akan tetapi lebih jauh harus juga berperan sebagai sarana pembangunan di bidang sosial budaya dalam konteks pembangunan yang memiliki cakrawala luas.

Kemudian usaha untuk menjadikan Indonesia sebagai "tuan rumah di negara sendiri" dalam bidang perfilman, kuantitas pemutaran film untuk bioskop terus ditingkatkan.

Untuk mengetahui kegiatan arus penonton dan jumlah film komersil yang beredar di Nusa Tenggara Timur hingga akhir tahun 1982. Lihat Tabel IV-15.

Disamping mengadakan kegiatan pengawasan dan pengamatan film-film komersil di bioskop-bioskop, Pemerintah Daerah melalui Instansi Penerangan juga mengadakan penyebaran film-film penerangan secara bergilir bagi gedung-gedung bioskop yang ada. Kemudian bagi film-film milik Badan Agama serta Badan Sosial lainnya pun masa putarnya dikordinir secara langsung oleh Departemen Penerangan di daerah NTT. Ini dimaksudkan agar tercipta suatu iklim yang harmonis melalui media film. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih yang kurang baik terhadap citra aparatur pemerintah. Masyarakat secara teratur akan dapat menerima informasi dari pemerintah mengenai berbagai kebijaksanaan secara lebih baik.

Perlu pula diketahui bahwa jumlah gedung bioskop yang berada di Nusa Tenggara Timur tercatat sejumlah 14 buah gedung bioskop. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya masuk dalam golongan A, 6 buah, golongan B dan selebihnya yang 6 buah dalam kelas/golongan C. Rata-rata gedung bioskop memiliki 500 buah tempat duduk lebih. Bahkan pada gedung bioskop "Kupang Theatre" memiliki tempat duduk sebanyak 940 buah.

Bakohumas

Salah satu faktor penentu bagi berhasilnya pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat luas harus diikutsertakan dalam setiap program pemerintah. Bahkan lebih jauh masyarakat harus diupayakan agar setiap program pemerintah dapat secara langsung merasakan manfaatnya. Dengan demikian secara sadar dan sukarela masyarakat itu akan memberikan dukungan semaksimal mungkin terhadap setiap program pembangunan.

Berangkat dari sini maka dirasakan penting untuk membangun dan meniti suatu sistem komunikasi sosial. Salah satu dari keinginan tersebut adalah tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 061/2851/SJ tentang Pembentukan Biro Humas Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Biro ini betanggungjawab langsung kepada Gubernur, dengan tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional satuan-satuan Humas Kantor-kantor Wilayah Departemen, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Instansi-instansi Vertikal Tingkat Propinsi lainnya dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk lebih memantapkan fungsi dan peranan Kehumasan, maka pada awal tahun 1982 diadakan Rapat Kehumasan Daerah Tingkat I dan II serta unsur-unsur penerangan Propinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia di Jakarta. Khusus dalam kaitannya dengan tugas-tugas pokok Kehumasan, maka telah diadakan pertemuan antar para petugas Humas instansi tingkat Propinsi maupun instansi lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari penyebarluasan tugas-tugas kehumasan, maka melalui APBD tahun 1982/1983 di Kupang telah diadakan Penataran/Latihan petugas-petugas Humas yang diikuti oleh para calon Kepala Bagian Humas Pemerintah se Nusa Tenggara Timur dan Humas Dinas/Lembaga dan Instansi Vertikal lainnya sebanyak 43 orang peserta.

These three aspects of film development have placed the film to have a definire language in its position as an influential communication medium. In the other side its role as entertainment products also provides a social function, in the meaning that film carries out information to the people, possessing capability to effect taste, the attitude of value, understanding and consciousness of man about himslef, his people and nation as well as the meaning of life either in positive or negative senses.

Starting from such policy, the regional administration through Bapfida (Body of Regional Film Guidance) of the East Nusa Tenggara province in an integrated and continual supervision on commercial film operatiing in the cinemas of the region. This policy has a reason considering that the function of film in general is not just as an entertainment product, but also furtherly ought to have a role as a development products in the field of social culture within the context of the development having a broader horizon.

Then the efforts to make Indoemsia as the host in its own state in the field of film, quantity of film projection for cinemas have been continually accelerated.

To know the amount of cinemagoers and the number of commercial films circulated in the East Nusa Tenggara. See Table IV-15.

Tabel / *Table IV — 15*

ARUS PENONTON DAN JUMLAH FILM KOMERSIL TAHUN 1982
AMOUNT OF SPECTATORS AND TOTAL NUMBER OF COMMERCIAL FILMS IN CIRCULATION

Negara Asal Film / *The Producer's state*	Jumlah Judul / *Number of Titles*	Jumlah Hasil Pemutaran / *Number of Projecting results*	Jumlah Penonton / *Number of spectators*
01. Film Indonesia/ *Indonesian film*	156	1.560	198.526
02. Film Hongkong/ *Hongkong film*	147	588	67.394
03. Film Amerika/ *American film*	76	324	25.249
04. Film Jepang/*Japanese film*	19	90	21.627
05. Film Korea/*Korean film*	18	68	18.748
06. Film Perancis/*French film*	4	20	4.150
07. Film Kuwait/*Kuwait film*	6	30	6.317
08. Film India/*Indian film*	4	20	4.350
09. Film Kanada/*Canadian film*	4	20	4.553
10. Film Yugoslavia	2	10	4.553
11. Film Thailand/*Thai film*	4	20	914
12. Film Belanda/ *Netherlands film*	3	15	448
Jumlah / *Total*	443	2.555	[illegible]

Besides supervising activities and observation of commercial films in the cinemas, the regional administration also through information and institutions and distributing of information films in turns for the cinemas in the region. For the films produced/owned by religious bodies and other social bodies, the opportunities of projection are also put under the coordination of the Regional office of the Department of Information of the East Nusa Tenggara. This policy had been taken pouposedly to create a harmonious sphere through film media, to avoid overlapping side effects, which will give a bad images for the governments apparatus. The society members on order to be able to receive information regularly from the goverriment about various policies in a better methods.

It is necessary to know that the total number of cinemas in the East Nusa Tenggara province are 14 cinemas, 2 in the category of A group, 6 in the B group and 6 other in the C group. The average of every cinema is possesing about 500 chairs, while even Kupang Theatre already having 940 chairs.

Bakohumas - Coordinating Body of Public Relations.

One of the decisive factor in the success of development is the people's participation. In other word, the whole people ought to be invited in every government programme. Even furtherly, the people should feel the benefits of the governmental programmes. Doing so with full consciousness and voluntarily, those people will give their maximal support for every government's development programmes.

From this starting point, it is considered improtant to create and to draw a system of social communication. One of the desires is channelized in the Intruction of the Minister of Home Affairs No 061/2851/SJ about the setting up of Public Relations Bereau for the province of East Nusa Tenggara.

In everyday duties, this Bereau ought to be responsible directly to the Governor, with the duty to coordinate operational activities of the public relations

Hasil-hasil yang dicapai antara lain :

BAKOHUMAS

Di mana sistem penerangan terpadu lewat Organisasi BAKOHUMAS melalui Keputusan Gub Kd Tk I NTT No 05/1980 telah banyak membantu melancarkan informasi di Daerah ini. Semua Kabupaten Daerah Tingkat II telah memiliki wadah BAKOHUMAS Tingkat **Kabupaten/Daerah** Tingkat II, namun masih belum semua memiliki **penerbitan Bulletin** BAKOHUMAS.

Koran Masuk Desa

Di mana telah dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Penerangan **Republik Indonesia** No 203 A/Menpen/1979 maka terhitung tanggal 6 Pebruari 1981 Surat Kabar Kupang Pos telah dijadikan KMD Nusa **Tenggara** Timur.

P W I

Di Nusa Tenggara Timur untuk mencapai maksud yang sama telah dibentuk Organisasi PWI Perwakilan Nusa Tenggara Timur yang untuk sementara berkantor di Jln Palapa 18 Kupang (Balai Wartawan untuk sementara disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Penerangan Nusa Tenggara Timur).

TVRI

Di mana sejalan dengan keinginan bangsa, maka secara bertahap dan **berkelanjutan** telah tersebar hampir di seluruh Nusa Tenggara Timur Stadion Pemancar/Relay. Khusus mengenai pembangunan Stasion relay TVRI beberapa dilaksanakan dengan program Hankam/LEN yang dapat dikatakan sementara sedangkan direncanakan akan direhabilitasi dan yang lainnya dilaksanakan melalui proyek secara crash program. Untuk itu dapat dijelaskan bahwa kemajuan pelaksanaan proyek-proyek TVRI di Nusa Tenggara Timur baik melalui DIP 1980/1981 maupun Crash Program dalam DIP 1982/1983 adalah sebagai berikut:

a) Proyek TVRI dengan lokasi di Adonara, Kabupaten Flores Timur telah mencapai kemajuan untuk bangunan fisik 95%, menara 95%, pengiriman peralatan 100% (meskipun peralatannya belum berada di lokasi proyek, tetapi baru berada di pelabuhan Waileba, karena kesulitan transportasi. Untuk Instalasi masih menunggu tibanya peralatan tersebut sampai di lokasi proyek. Sesuai dengan petunjuk LEN bahwa setelah tibanya peralatan di lokasi, langsung segera dibangun anthena penerima agar segera dapat beroperasi.
Diharapkan paling lambat dalam bulan Mei 1983, TVRI Adonara sudah dapat mengadakan siaran percobaan. Program ini merupakan realisasi proyek dari DIP 1980/1981 dengan anggaran sebesar Rp153.325.000,-.
b) Proyek TVRI dengan lokasi di Kupang (OEbufu) dari DIP 1982/1983 dengan dana sebesar Rp144.450.000,- kini sementara dalam persiapan untuk anwijzing setelah dirampungkan gambar dan bestek yang telah disetujui oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum. Sasaran dari pembangunan proyek ini adalah untuk pembangunan gedung Operasional mobit Unit, Pemagaran, pembuatan rumah dinas dan lain-lain.
Untuk diketahui bahwa mobil Unit untuk siaran luar dan seluruh peralatannya sudah berada di Kupang dan tinggal dioperasikan setelah selesainya proyek ini. Diharapkan proyek ini dapat diselesaikan dalam tempo 150 hari atau nanti pada bulan September 1983.
c) Proyek TVRI dengan lokasi Atambua (Belu) dari DIP 1982/1983 dengan dana sebesar Rp219.530.000,- kini sementara dalam pengecekan gambar dan bestek pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur. Diharapkan proyek ini (yang merupakan rehabilitasi dari proyek TV Hankam) dapat diselesaikan dalam waktu 180 hari, terhitung mulai bulan Mei 1983.
d) Sesuai revisi DIP 1982/1983 telah disediakan dana (tambahan) sebesar Rp71.250.000,- masing-masing untuk lokasi Waikabubak (Sumba Barat), lokasi Kalabahi (Alor) dan Lokasi Bajawa (Ngada). Untuk tahap pertama biaya tersebut diperuntukkan bagi ganti rugi tanah termasuk pengurusan dan pembuatan jalan masuk dan halaman parkir, di mana untuk masing-masing lokasi disediakan dana Rp23.750.000,-. Sedangkan untuk pembangunan gedung pemancar dan menara serta perumahan, baru akan dimasukkan dalam DIP 1983/1984.
e) Selain proyek TVRI yang ditangani oleh Direktorat TVRI/Departemen Penerangan, Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan beberapa proyek TV sesuai dengan Crash Program dari Sekretaris Negara di mana untuk lokasi Ruteng telah memulai dengan siaran percobaan/darurat. Demikian pula lokasi Ende sudah melaksanakan siaran percobaan serta lokasi Kefamenanu juga telah melaksanakan siaran percobaan/darurat.

office of the Directorate Generals and vertical institutions of the provincial level in the province.

To intensify the funtion and the role of public relations in the beginning of 1982 have been carried out a regional meeting of public relations on the provincial and district level and information elements of the provincial and district level through out Indonesia in Jakarta. Particularly in the relationship with the principle duty of public relation workers, a meeting had been held in the provincial level with other institutions.

As a continual steps of the widespreading of the public duty, through regional budget APBD of 1982/1983 in Kupang have been carried out upgrading and traing for public relation workers, attended by the chiefs of the government public relation sections throughout the province and public relation officers from other intitutions, totally 43 members.

Results gained among others :

BAKOHUMAS *(Public Relations Coordination Body).*

Integrated system through the organization of BAKOHUMAS by the Governor's Decision No 05/1980, has helped a lot to the smoothness of information flows in this region. All the districts in the province have already in the possession of Bakohumas on the district level, yet noy all of them receive the Bulletin of BAKOHUMAS.

Rural Newspapers.

The programme of rural newspaper is carried out bassed on the Minister Decision of the Information Department No 203 A/Menpen/1979, by which the Kupang Pos becomes the rural newspaper for the province, since 6 February 1981.

PWI (The Indonesia Journalist Association)

For the improvement of information affairs in the region, have been set up the branch of PWI organization in the provincial level which temporary office at Jalan Palapa 18 Kupang, and a Journalist Hall for the time being be supplied by the regional office of the Information Department of the province.

TVRI

Parallel to the will of the nation, gradually and continuously have been spread to the whole region of the province the broadcasting and relay stations. Particularly about the development of several relay stations, some have been constructed under the programme of Defence Department/LEN (National Electronic Institute), which is of a temporary characteristic and several others have been constructed under the crash programme projects. For this purpose it can be explained that improving realization of TVRI programmes in the region either through DIP (Project Form Table) of 1980/1981 or thorugh Crash Programmes in the DIP 1982/1983, such as follows :

a). TVRI project at Adonara the district of East Flores, the achievement of physical construction was 95 %, tower construction 95 %, equipment delivery 100 % (although the goods are still not at the location, but already at the Waileba harbour because of transportation difficulty). For the installation they are waiting for the arrival of equipments concerned at the project location. According to the LEN's direction, that if all of the equipments have already arrived, the receiver anthena ought to be installed so that the station can be on operation. It is hoped that at least in May 1983 TVRI Adonara is already on air with experiment productions. This programme was a realization of DIP 1980/1981 under the budget totally Rp153,325,000,-

b). TVRI project at OEBUFU Kupang, from the DIP project of 1982/1983 with fund as much as Rp144,450,000. under the preparation of construction realization, after finishing the drawing and the blue print which are already cleared off by the office of regional Public Work Departmen. The goals of this project realization is the construction of operational building, mobile unit and fencing with official houses construction and so on.

The mobile unit and all of its equipment have already arrived at Kupang and are still waiting for the operation after the construction finished.

It was hoped that this project could be finished in 150 days of working or in the date of September 1983.

c). TVRI project of Atambua, the district of Belu from the DIP of 1982/1983 with the fund totally Rp219,530,000,- is now under the study of the drawing and the blue print, by the office of the regional Department of Public Work. It is expected that this project which is also as a rehabilitation of the Defence Department TV project will be finished in 180 working days, started from May 1983.

d). According to the revision of the DIP of 1982/1983, have been prepared additional finance totally Rp71,250,000,- each for the locations of Waikabudak (West Sumba), Kalabahi (Alor) and Bajawa (Ngada). At the first

RRI/RPD

RRI Stasion Regional I Kupang makin diperkuat daya pancar/siaran dengan dibantu berdirinya beberapa Radio Pemerintah Daerah (RPD) di beberapa Kabupaten dalam Wilayah ini dimana pada siaran-siaran tertentu RRI Stasion Regional I Kupang selalu direlai oleh tiap Radio Pemerintah Daerah (RPD) tersebut.

Penerangan Tatap Muka, Anjang Sana, Pameran, Sarasehan, Pertunjukan Tradisional/Rakyat dan kegiatan siaran Keliling dan lain-lain yang senantiasa ditingkatkan dan digalakkan di setiap tempat dan kesempatan sesuai dukungan dana serta daya yang ada.

Hambatan yang dihadapi antara lain :

- kekurangan tenaga Juru Penerang/operator yang tertampung;
- kurangnya dana dan sarana;
- kurangnya/ketiadaan percetakan yang memadai;
- minat membaca belum membudaya di Nusa Tenggara Timur.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut maka telah diadakan usaha antara lain diklat/menerima tenaga-tenaga Juru Penerangan yang terampil, yaitu berilmu pengetahuan berpengalaman dan punya prakarsa· Pengadaan dana dan sarana yang relatif mencukupi keperluan walaupun baru mencukupi dalam arti sementara serta sedang diusahakan peningkatan pengembangan dan pertumbuhan minat baca lewat media Surat Kabar/Majalah, terutama Surat Kabar Kupang Pos dalam program Koran Masuk Desa.

Dalam mensukseskan PEMILU Tahun 1982 Sidang Umum—MPR Tahun 1983, maka sesuai dengan penggarisan program dalam paket 10/PEMILU serta Peranan Penerangan dan Mass Media dalam PELITA III Nusa Tenggara Timur, maka telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dengan mempersiapkan pengiriman bahan-bahan penerangan baik berasal dari pusat maupun daerah ke seluruh jajaran Penerangan di tiap Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.

Adapun bahan-bahan penerangan tersebut dimaksudkan untuk kesiap-siagaan aparatur Penerangan guna memenangkan Orde Baru pada PEMILU 1982 dengan faktor-faktor pendukung lainnya ialah bertambahnya sarana penerangan yang mampu mendukung sasaran operasional penerangan seperti Juru Penerangan - Kecamatan, TV, Radio Cassette Recorder, Mobil Unit, dan lain-lain.

Kesiapan aparatur penerangan di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam setiap kegiatan operasional Penerangan yang membawa pesan-pesan penerangan PEMILU 1982, bahwa Bapak Jenderal (Purn) SOEHARTO sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Disamping itu aparatur Penerangan mendapat pengarahan-pengarahan khusus dari Pimpinan juga diadakan Diklat Juru Penerangan dan Penataran-penataran guna mensukseskan PEMILU 1982 demi kemenangan Orde Baru.

Selanjutnya dalam usaha penggalangan massa telah diberikan penjelasan kepada para tokoh masyarakat baik formal maupun informal, Generasi Muda yang tergabung dalam Karang Taruna maupun AMPI untuk mensukseskan PEMILU 1982.

Pelaksanaan kegiatan Operasional Penerangan Khusus dalam menghadapi pra PEMILU 1982 dilaksakan dalam bentuk operasi Khusus, dan memanfaatkan setiap pertemuan dengan pemutaran film. Secara kuantitatif maupun kualitatif kegiatan operasional penerangan dalam bentuk penerangan umum dari medio April 1981 sampai dengan Maret 1982 berjumlah 52 kali. Disamping itu telah dibentuk POSKO PEMILU dengan piket para Pejabat baik di Kantor Wilayah Propinsi NTT maupun di Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.

Di sinilah peranan yang dirasakan guna mencapai hasil-hasil itu, tugas-tugas penyuluhan dan motivasi penerangan PEMILU 1982 merupakan salah satu cara yang digunakan. Secara kuantitatif, maka kegiatan Operasional penerangan dalam bentuk penerangan umum dari bulan April sampai dengan November 1982 berjumlah 67 kali.

Khusus program mensukseskan Sidang Umum—MPR 1983 baik yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten, maka dibentuklah Satuan Tugas Penerangan (SATGASPEN). Kegiatan ini akan terus dilaksanakan dalam rangka memasyarakatkan hasil-hasil Sidang Umum MPR 1983.

Hal ini disebabkan karena secara geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 111 buah pulau, maka tidak setiap desa dapat dijangkau oleh arus penerangan secara optimal. Untuk mengatasinya maka secara bertahap diusahakan peningkatan dalam wujud pengadaan personel, prasarana, dana dan daya baik jumlah maupun mutunya.

Dukungan Administrasi

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain proses dan prosedur kerja, cukup tersedianya perangkat lunak (soft ware) dan perangkat keras (hard

phase, the finace were for land reimbursement, including the road construction with parking squares, where for each location is received totally Rp23,750,000,- While for the construction of broadcasting stations, towers and housing will be financed under the DIP of 1983/1984.

e). Besides TVRO programmes conducted by The Directorate of TV, the regional administration also has constructed other TV programmes under the crash programme of the Secretariate of the State, i.e. at Rutong location which is already under an experiment production, and at Ende location and Kefamenanu also both are already under experiment productions.

RRI (National Radio) and RFD (Regional Radio)

In fact RRI Regional I station continually increases its broadcasting power by the construction of Radio of the Regional administration in several districts in the region, where certain programmes ought to relay the programmes of the RRI Regional I Kupang.

The information of face to face method, visitation, exhibition, workshop, traditional performance/folks play and round about performances among others are always in an increasing frequency and have been stimulated in every place and occasion according to the existing fund and forces. Obstacles emerged among others are : - Lacking of skilled information officers / operators, lacking of fund and facilities, lacking of printing house, the low level of reading minded in the province.

To overcome such hindrances mentioned, efforts have been taken among others through training / enrolling of skilled information officers i.e. with scientific background descriptions, experiences and initiatives. Supply of fund and facilities which are relatively sufficient to the need, although still in the temporary level, and also with the efforts to increase the people's reading minded and habit through media of newspapers/magazines especially through the Kupang Post Newspaper, as a rural newspaper (KMD media).

In relation to the success of Pemilu (General Election) of 1982 and the General Assembly of the MPR (The People's Assembly in 1983, according to the outline of the programme in the package 10 / Pemilu, with the role of Information and Mass Media in Pelita III of the province, activities have been carried out with the preparation of information materials deliverances, either from the regional administration or the central government, to all informational groups in every district of the province.

All of the materials have been prepared for the readiness of the whole Information Apparatus to win victory for the New Order in the general election of Pemilu 1982, with other supporting factors such as additional facilities which able to assist the operational goals such as sub-districts information offices, TV, Radio Cassettes Recorders, Mobile Units and so on.

The readiness of Information Apparatus in the province canbe seen on their information operation carrying out the General - election/Pemilu messages, i.e. about Bapak General (Retired) Suharto as the Father of the National Development. Besides that Information Apparatus also received special guidances from their officers, also training under instructors of DIKLAT (Education and Training) and upgrading to the success of the General Election of 1982 for the victory of the New Order.

Further for the mobilization of the mass information have been given to the social leaders in formal or informal figures, so with the younger generation in the Youth Centres organizations of AMPI (The New Exponent in Indonesian Development) to the success of the General Election.

The realization of informal operation of special package in facing up the pre-general election period, have been carried in the form of special operation and to utilize every meeting with film projections.

Quantitatively and qualitatively the information operational activities from medio April 1981 to March of 1982 totally 52 operations. Besides, the POSKO (Command Post) of general election has been set up with picket officers from the regional administration officers or from district office.

From all of these activities, it can be felt the role to reach victory in the 1982 general election, wherein for that purpose the information duty in promoting and motivating are the ways through which the target may be achieved. Quantitatively the operational activities in form of public information from April to November 1982 totalled 67 operations.

Administrative Support

Activities conducted among others include the arrangement of working process and procedure and the supplying of sufficient software and hardware and fund.

Information Office of East Nusa Tenggara Province and the 12 kabupaten in this province always endeavour to equip facilities, infrastructures and skilful personnels. The result acquired is that at the moment better administration, inclusive of personnels, have been available.

ware) untuk mendukung suksesnya pembangunan penerangan dan penerangan pembangunan, berikut dana yang memadai.

Untuk itu Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi dan ke 12 Kabupaten se—Nusa Tenggara Timur senantiasa berupaya dalam melengkapi sarana, prasarana dan personal yang terampil baik kuantitas maupun kualitas.

Sebagai hasil yang dicapai maka sampai saat ini, telah dirasakan adanya beberapa perbaikan dan penambahan personal di bidang kepegawaian yang cukup menggembirakan.

Peralatan dan sarana Penerangan

Dalam tahun anggaran 1978/1979 hingga tahun 1982/1983 jumlah peralatan radio cassette sebanyak 820 buah, kaset kosong 3.750 set;

Information Equipment and Facilities

In the period of 1978/1979 through 1982/1983, the total of radiocassete was 820 units, blank cassete 3,750, black and white television 386, colour television 20, Muviani 5, Rex Rotary Recorder 1, overhead projector 13, typewriter 2 and mini offset printer 1 unit.

TV hitam putih 386 buah; TV colour 20 buah; Muviani 5 buah; Mesin perekam (Rex Rotary) 1 buah, Overhead proyector 13 buah, mesin tik 2 buah dan mesin cetak/offset mini 1 buah.

B A B / *CHAPTER V*

LIPUTAN DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

THE COVERAGE ON THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

GEMURUHNYA mesin Jet F—28 Garuda tepat jam 11.00 menandakan hendak mendarat di Bandara "El-Tari", Kupang. Ini senada dengan gemuruhnya gerak pembangunan yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi ajang peliputan tim Redaksi "Indonesia Membangun".

Peliputan bidang pembangunan di Propinsi yang terkenal dengan kayu Cendananya dan hingga kini diekspor ke negera Perancis itu memang memperlihatkan prospek cukup menggembirakan.

Kenyataan yang dilihat dan diperoleh di lapangan memang tidak berlebihan dan tidak mengada-ada. Di Propinsi yang terkenal dengan operasi "Nusa Makmur" yang mengangkat citra wilayah dari daerah kurang pangan menjadi mampu untuk berswasembada pangan dari tahun ke tahun memperlihatkan peningkatan di segala bidang.

Salah satu hasil liputan yang menarik dan dapat diangkat ke permukaan guna dijadikan contoh bagi daerah lainnya, yang kondisi alamnya sama, adalah Proyek Nusa Tenggara Timur - Livestock Development Project (ATA—138) di daerah Besi Pae, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Menurut Ir E Tjaong Saka, Project Manager, ide memanfaatkan teknologi Autralia dalam Pembangunan Nusa Tenggara Timur sebelum tahun 1980 adalah melalui pendekatan formal dan informal Gubernur Ben Mboi dengan Duta Besar Australia Mr R Chritchley.

Dan kemudian didukung adanya kesamaan iklim antara Australia Utara dengan Nusa Tenggara Timur. Di penghujung bulan Pebruari 1980, Gubernur Ben Mboi mengunjungi Australia dan menyaksikan sistem usaha pengembangan pertanian wilayah semi-aried. Dalam kesempatan itu ADAB (Australia Development Assistance Bureau), Mr J Ingram menyanggupkan untuk membantu pembangunan proyek serupa di Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan Project Reconnaissance Mission. Kegiatan proyek ini berlangsung 4 tahun dan dimulai pada tahun anggaran 1982/1983. Penanggungjawab dari pihak Indonesia Direktorat Jenderal Peternakan, di tingkat propinsi Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur.

Menurut Ir Tjaong, selama ini ternak terkonsentrasi di sekitar pemukiman penduduk yang terdapat sumber air, sehingga stocking rate sangat tinggi. Hal ini menyebabkan kondisi ternak kurang baik, terjadi kerusakan padang dan mempersempit keinginan usaha intensifikasi. Selain itu, pertambahan penduduk tiap pemukiman membawa kemungkinan 2 alternatif, yaitu: lahan usaha makin sempit sehingga pendapatan menurun dan pembukaan lahan baru mengancam areal hutan dan tanah miring, sehingga kelestarian lingkungan terancam.

Umumnya pola usaha tani tanah kering di Nusa Tenggara Timur merupakan perpaduan antara keluarga tani dan sumber air, ternak, tanaman pangan dan lingkungan mereka. Karena itu bentuk perpaduan ini menjadi landasan penyusunan strategi pembangunan proyek. Pembangunan ini dititikberatkan pada sasaran peningkatan produksi peternakan. Kegiatan pembangunan ini meliputi perbaikan makanan ternak, perbaikan manajemen ternak, perbaikan organisasi dan ketrampilan peternak, peningkatan kemampuan staf dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Berjarak sekitar 70 Km dari Kupang, proyek ini berlokasi di areal penggembalaan 4 buah desa. Yaitu Mio, De Ekam, Polo dan Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan. Lokasinya diberi nama Besi Pae sebagai hasil tinjauan sejarah masa lalu dari keempat desa. Dengan luas areal 4.000 Ha hutan dan 2.300 Ha padang penggembalaan. Lihat Tabel V-1.

Ironisnya pada musim kemarau keempat desa ini mengalami kesulitan air karena mata air/kali semuanya mengering. Untuk mendapatkan air minum untuk manusia dan ternak harus menempuh jarak 5 Km dari desa.

Seluruh fasilitas yang telah dibangun, dimanfaatkan dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat yang berasal dari 4 desa yang berada sekitar proyek. Kecuali areal GMU Besi Pae seluas kurang lebih 200 Ha. GMU (Group Management Unit) Besi Pae ini dikelola oleh Dinas Peternakan sebagai pusat kegiatan pembinaan dan pelayanan terhadap peternak setempat.

Areal yang seluas 4.000 Ha berasal dari tanah suku desa sekitar (Mio, Polo, Linamnutu dan De Ekam). Melalui beberapa kali musyawarah antara pemerintah dengan tokoh-tokoh desa (Kepala Suku) disepakati menyerahkan tanah ini kepada Pemerintah untuk pembangunan proyek. Kemudian status tanah ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan

THE ROAR of Garuda F-28 machine at 11:00 signified that this airliner was about to land at El Tari Airport, Kupang. Such a noisy sound was really in harmony with that of the development being carried out actively in the Province of East Nusa Tenggara. It was this development that became a subject to be covered by the Editorial Team of the Developing Indonesia.

Indeed, the development in the province famous for its sandalwood production has shown a rejoicing prospect. The data gained in the field indicate that "Nusa Makmur" operation was a success. It has made this territory self productive for foodstuff.

One of the striking results of the coverage suitable to be used as a sample for the areas having the same natural condition is East Nusa Tenggara Livestock Development Project at Besi Pae, Kabupaten Southern Central Timor.

According to Ir E Tjaong Saka, the Project Manager, the idea for utilizing Australian technology for the development of East Nusa Tenggara resulted from the approaching steps (formal and informal) between Ben Mboi, East Nusa Tenggara Governor and R Chirtchley, Australian Ambassador, which were conducted before 1980.

In fact, both Australia and East Nusa Tenggara has a similar climatic condition - semi-arid. In February 1980, Governor Ben Mboi paid a visit to Australia in order to see the system applied for the development of agricultural field. In that occasion, ADAB (Australian Devlopment Assistance Bureau) represitative, J Ingram, consented to distribute an aid to the similar development in East Nusa Tenggara and prepared Project Reconnaissance Mision. Activities of the project was started from the budgetary year of 1982/1983 and ran for 4 years. The responsibility was held by the Directorate General of Animal-Husbandry, which was represented by Animal Husbandry Office of East Nusa Tenggara.

Ir Tjaong stated that animal-breeding has so far been centralized in public accomodation where water source exists. As a consequence, the stocking rate resulted is very high and so causes a bad condition for breeding-animal. Pasture is the damaged and intensification becomes less. In addition, population increase in each spot brings about 2 possible alternatives: cultivated land becomes more narrow so that income decreases ; the opening of new cultivated land threatens forest areas and enhangers natural environment.

In general the type of agricultural undertaking in East Nusa Tenggara is an integrated result of farmers'family, water source. breeding-animals, foodstuff and their surroundings. On this account, this reflection became a basic for arranging the strategy of project development. The development was aimed at increasing the production rate of animal-husbandry. Tha activities involved in it include the betterment of fodder, the betterment of animal-breeding management, the betterment of organization and farmers' skills, the enhancement of ability and the preservation of natural environment.

The project was located in 4 villages (Mio, De Ekam, Polo and Linamnutu - the Sub-district of South Amanuban), 70 km away from Kupang. The term Besi Pae used for the location reflects the previous history of the 4 villages. It covers a forest area of 4,000 Ha and a pasture of 2,3000 Ha. See Table V-1.

Tabel / *Table V — 1*

POTENSI DESA TAHUN 1984
THE POTENCY OF VILLAGES IN 1984

Potensi / *Potency*	Desa/*Village*			
	Mio	De Ekam	Polo	Linamnutu
1	2	3	4	5
1. Lahan Kosong/ *Unexploited land area*	2.081	3.221	3.165	1.630
2. Penduduk/*Population*				
Kep Keluarga/ *Number of families*	346	432	925	280
Jumlah Keluarga/ *Number of persons*	1.408	1.915	4.770	1.160
3. Ternak/*Livestocks*				
- Sapi/*Cattles*	1.350	940	13.010	1.018
- Kerbau/*Buffaloes*	34	50	100	24
- Kuda/*Horses*	—	—	—	—
- Babi/*Pigs*	452	1.520	3.853	534
- Kambing/*Goats*	153	325	3.153	195
- Unggas/*Poultry*	1.485	976	2.703	545

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 94/Pem/1983 tanggal 19 September 1983.

Secara keseluruhan lokasi tanah ini berada di bawah pengawasan Dinas Peternakan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan status hak kelola atau HGU (Hak Guna Usaha). Bagi rakyat setempat yang telah lama bermukim dan atau telah lama mengusahakan kebun di dalam areal proyek diberikan tanah untuk usaha pertanian dan pekarangan dengan status hak milik. Biaya pembuatan sertifikat ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Direncanakan luas tanah yang diberikan kepada setiap Kepala Keluarga adalah 2 - 3 Ha agar dalam usaha pertanian tanaman pangan dapat diterapkan pola usaha Pertanian Rotasi.

Direncanakan bagi rakyat lainnya dari ke—4 desa dan sekitarnya akan turut memanfaatkan proyek ini, juga akan diberikan tanah untuk usaha tanaman pangan dan atau perumahan dengan luas yang sama. Namun statusnya tidak langsung menjadi hak milik, tetapi melalui masa percobaan/penelitian. Bila ternyata selama masa percobaan/penelitian yang bersangkutan giat berusaha dan menunjukkan keinginan untuk menetap seumur hidupnya, baru kepadanya diberikan status hak milik. Pemberian status ini atas permintaan Dinas Peternakan kepada Pemerintah Daerah (Agraria).

Sisa areal yang tidak digunakan untuk usaha tanaman pangan akan digunakan untuk penggembalaan ternak dari masyarakat tetapi statusnya tetap dalam pengawasan Dinas Peternakan. Status ini dapat diubah menjadi hak pakai bila kelompok tani setempat meningkatkan organisasi kelompoknya menjadi Koperasi (Badan Hukum). Perubahan status ini juga atas permintaan Dinas Peternakan Propinsi kepada Agraria.

Proyek ini dibagi 11 wilayah yang disebut GMU. Luas tiap GMU berkisar antara 200 - 500 Ha. Masing-masing GMU dibuat pagar pemisah dengan kawat duri lengkap dengan pintu-pintu. Masing-masing GMU dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung usaha pertanian/peternakan antara lain Danau buatan untuk sumber air dan dilakukan perbaikan padang.

Rakyat dari keempat desa sekeliling proyek dipilih untuk memanfaatkan dan atau bermukim di dalam tiap-tiap GMU ini. Jumlah Kepala Keluarga di dalam satu GMU berkisar 20 - 50 KK, tergantung kapasitas tampung lahan masing-masing GMU dan juga memperhatikan perkembangan pembentukan keluarga.

Bagi Kepala Keluarga yang tidak memiliki ternak akan diberikan paket kredit ternak Pemerintah dalam bentuk Kopel.

Untuk kepentingan mengelola GMU, maka semua Kepala Keluarga dalam GMU tergabung dalam satu organisasi Kelompok Tani. Bentuk organisasi ini juga akan mempermudah usaha pembinaan dari Pemerintah agar dapat berkembang dengan baik dan diharapkan akan menjadi kecambah (cikal bakal) Koperasi Peternakan.

Berdasarkan keadaan tanah dan topografi maka kegiatan usaha tani pun disesuaikan. Untuk itu maka GMU dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Kelompok GMU yang dapat digunakan untuk perumahan, usaha tanaman pangan dan penggembalaan ternak.
2. Kelompok GMU yang hanya dapat digunakan untuk penggembalaan ternak, karena tidak ada areal yang cocok untuk usaha tanaman pangan.
3. Kelompok GMU yang sama sekali tidak cocok untuk tanaman pangan dan penggembalaan ternak. Kelompok yang berupa lereng-lereng yang curam dan dihijaukan baik dengan lamtoro maupun tanaman buah-buahan, perkebunan dan kayu-kayu bangunan.

Sesungguhnya tujuan mulia diadakan proyek tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup petani peternak di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur. Diupayakan dengan meningkatkan produksi peternakan dan komoditi lainnya melalui pengadaan sumber air, perbaikan sistem usaha tanaman pangan, organisasi/ketrampilan petani dengan pola GMU dan peningkatan kemampuan aparat Dinas di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan semuanya dikaitkan dengan memperkecil kerusakan lingkungan.

Diharapkan proyek itu bermanfaat bagi :

- Pengadaan sumber air dengan menampung air hujan dalam danau buatan dari tanah dengan mengalirkannya ke daerah-daerah tertentu melalui pipa dalam tanah, baik untuk kepentingan penduduk maupun ternak.
- Meningkatkan dan memperbanyak sumber makanan ternak.
- Memperbaiki manajemen ternak dengan suatu pola yang tepat.
- Memperbaiki organisasi dan ketrampilan petani.
- Terciptanya lingkungan yang lebih stabil/baik dari perpaduan usaha.
- Peningkatan kemampuan staf agar dapat menangani pembangunan selanjutnya.

Seperti telah dijelaskan di muka, tujuan utama kegiatan pengadaan sumber daya air ini adalah mengembangkan teknologi yang cocok

Ironically, during the dry season the 4 villages lack of water, for all water sources / rivers are drying up. Drinking water for human beings and breeding-animals can only be reached in a place 5 km away from the location.

All facilities that have been constructed are utilized and managed directly by local people originating from the 4 villages, except Besi Pae GMU extending by approximately 200 Ha.
Group Management Unit of Besi Pae (Besi Pae GMU) is managed by Animal-Husbandry Office and utilized as an activities centre for promoting and assisting local animals-breders.

An area of 4,000 Ha was previously the tribal land that had been consented by the headmen of the four villages to be governmental land for project development. The status of this land was then confirmed under East Nusa tenggara Governor's Decree No 94/Pem/1983 of September 19, 1983.

Each family was planned to receive 2 - 3 Ha of the land for fooodstuff agriculture. It was expected that the type of Rotation Agriculture could be applied.

For those who hav long lived or farmed in the area of the project, land of ownership status was given. The cost of making the certificate was all paid by Regional Government.

It was also planned that people belonging to the four villages and their surroundings could receive land with the same extent for foodstuff agriculture and or accomodation. Yet, the status of individual ownership could only be gaide after probation/investigation period proved that th e people concerned really had a desire to live here permanently for ever.

The rest of the land which was not used for foodstuff agriculture was utilize for animals-breeding. It was under the supervision of Animals-Husbandry Office. Its status could only be changed to be usufruct on condition that local farmers group engaged themselves ina Cooperative (with Corporate Body).

The project was divided in 11 areas, each of which was called GMU and ranged from 200 to 500 Ha. Each GMU was equipped with seperating barded-wire fence and agricultural/animal-breeding supporting factors.

Total of families in every GMU ranged from 20 - 50, depending upon the capacity of its land. For those who did not own breeding-animals, Government gave them credit packets of breeding-animals.

On the basis of land condition and topography, GMU was divided in 3 groups :

1. *For housing, foodstuff undertaking and animal-breeding.*
2. *For animals-breeding only.*
3. *Neither for foodstuff undertaking nor animals-breeding. This group was in the form of steep slopes and planted with fruits, trees of building wood and used for plantation.*

The project was expected for :

- *Supplying water and receiving rain-water in artificial lakes.*
- *Enhancing fodder.*
- *Battering animals-breeding management.*
- *Bettering organisation and farmers' skills*
- *Creating a more stabil environment.*
- *Creading a more stabil environment.*
- *Enhancing staff abilities.*

Ir Tjaong further stated that the artificial lakes were created under the system of land construction. The kind of soil was then influential for the successrate of receiving water. 4 kinds of soil had been investigated in makin these lakes: Bobonaro Clay, Viqueque Formation, Alluvial and Lacustrine. Infact the suitable ones were Bobonaro Clay, Alluvial Terace and Lacustrine.

Activities for the preservation of project include :

(a) *Safeguarding the Catchment Area. It is directed to prevent erosion and the shallowing process of the lake and the aquatic population. This programme is undertaken through the planting of trees for regreening as well as for cattle fodder. The tree species include lamtoro, siratro and stylosanthes following the area contour.*
(b) *Safeguarding the Dam and Spillway. This programme is also realized by planting creeping plants with deep roots which are useful for cattle fodder. By this activity it is expected to prevent erosion in the dam and spillway areas.*
(c) *Preventing damage due to human activities in exploiting water resources. This programme is realized through the making of water vessels far from the lake. These water vessels are equipped with distribution networks.*
(d) *Maintaining lake components. For general maintenance and repair of small components, fund and personnel area required. Thus, by agreement among the water users, fund is collected through monthly contribution, as much as Rp100. per family. Two among them are appointed water controlers. They are given special training to manage small repairs as well as to realize their tasks.*

dengan kondisi setempat untuk memanfaatkan curah hujan. Terutama untuk mengatasi kebutuhan air sepanjang musim kemarau dan prinsip yang digunakan adalah menampung air hujan di dalam Danau buatan.

Lebih jauh Ir Tjaong menambahkan, danau buatan ini dibangun dengan sistem konstruksi tanah. Baik dasar, dinding/tanggul maupun saluran pembuangannya. Oleh karena itu jenis tanah sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menampung air. Upaya pengamatan pembuatan danau yang telah dibangun ada 4 macam tanah (Bobonaro Clay, Viqueque Formation, Aluvial dan Lacustrine). Ternyata tanah yang cocok adalah (a) Bobonaro Clay, (b) Aluvial Terace dan (c) Lacustrine.

Sementara upaya bagi kelestarian proyek, penanganan yang dilaksanakan berupa tindakan pengamatan danau. Usaha pengamanan yang dilakukan :

(a) Pengamanan Catchment Area. Bertujuan untuk mencegah erosi dan pendangkalan danau serta populasi air. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman pohon penghijauan yang sekaligus untuk makanan ternak, seperti lamtoro, siratro, stylosanthes yang penanamannya dilakukan dengan mengikuti garis Contor. Disamping itu di seluruh catchment area oleh masyarakat.
(b) Pengamanan Tanggul dan Spillway. Kegiatan ini juga dilakukan dengan penanaman jenis tanaman makanan ternak bersifat menjalar dan berakar dalam. Dengan tindakan ini diharapkan tidak terjadi erosi pada tanggul spillway.
(c) Pencegahan kerusakan akibat kegiatan manusia dalam rangka pemanfaatan air. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat bak-bak pemakaian air jauh di luar lokasi danau dengan sistem jaringan distribusi air.
(d) Perawatan komponen danau. Untuk keperluan perawatan, dan perbaikan komponen-komponen kecil yang rusak sangat diperlukan dana dan tenaga. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan anggota pemakai air, dilaksanakan pengumpulan dana melalui iuran bulanan sebesar Rp100,00/Kepala Keluarga. Diantara mereka ditunjuk 2 (dua) orang pengawas air. Kedua petugas dari tiap danau telah dilatih untuk menguasai teknis perbaikan kerusakan kecil serta petunjuk-petunjuk lainnya yang berkaitan dengan tugasnya.

Selama 4 tahun fase I telah dibangun sebanyak 22 buah danau, 3 diantaranya dibangun agak jauh di luar Besi Pae, yaitu di Takari. Tingkat keberhasilan ke—22 buah danau ini menunjukkan sebagai berikut :

— 2 buah tidak dapat menahan air (porous).
— 2 buah hanya bertahan sampai pertengahan musim kemarau akibat jenis tanah dan tingkat aliran air yang rendah dari carchment area.
— 1 buah bertahan sampai menjelang musim hujan berikutnya.
— 17 buah sangat memuaskan, dimana sampai musim hujan berikutnya masih terdapat sisa air yang sangat banyak.

Potensi Wisata NTT jadi andalan

Memang tidak berlebihan bila dikatakan, penekanan bidang pariwisata di propinsi ini mempunyai keterkaitan yang erat antara kekayaan alam disatu pihak dan kekayaan budayanya. Ini terlihat dengan ditonjolkannya kedua sektor tersebut di atas dalam rencana pengembangan. Sementara Rencana Induk Pengembangan (RIP) di bidang inipun diproyeksikan hingga tahun 2000-an.

Potensi-potensi alam yang patut ditonjolkan untuk komoditi non migas sebagai sumber devisa Pemda khususnya di bidang pariwisata adalah Taman Nasional Komodo (Fauna), danau tiga warna (Kelimutu), penangkapan ikan-ikan paus (di Pulau Lembata) dan batu Megalit yaitu pemakaman jenazah yang ditutup dengan batu.

Berbeda dengan di Propinsi Bali misalnya, di daerah itu khususnya di Desa Trunyan, jenazah tidak dikubur tetapi hanya ditaruh di tanah lapang terbuka dan hanya dibatasi oleh pagar dari pelepah daun kelapa.

Selain itu potensi lainnya adalah di bidang Taman-taman Laut. Seperti di Kabupaten Ngada (Riung), Labuhan Bajo, Kabupaten Sumba Barat, Pulau Semaut, Kabupaten Kupang, dan di Kabupaten Sikka berupa cottage di tepi pantai yang dikelola PT Sao Wisata.

Sementara potensi budaya yang juga dapat ditonjolkan adalah : Batu-batu kubur (megalit), kampung-kampung tradisional di Sumba Barat, Proi Golie di Kabupaten Ende, Desa Moni di Kabupaten Ngada, Desa Soa di Kabupaten Manggarai (Ruteng) dan Labuhan Bajo.

Untuk lebih terincinya mengenai hasil liputan Tim "Indonesia Membangun", mengenai potensi-potensi wisata di Propinsi Nusa Tenggara Timur, dapat diikuti tahapan kunjungan sebagai berikut :

— Tahap I adalah potensi wisata yang dapat dikembangkan di Pulau Timor, Pulau Flores dan Pulau Sumba.

Secata umum Pulau Timor dibagi atas dua bagian; Timor Timur dan Timor Barat. Timor Timur merupakan satu propinsi tersendiri, sedang Timor Barat masuk di dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur,

During a period of 4 years.22 lakes had been built. 3 of them were located far enough fromBesi Pae, ie in Takari. The result of the 22 lakes was classified as follows :

- *2 units could not stand water (porous)*
- *2 unis clould only stand stil the middle of summer because of the kind of soil and the low rate of flow catchment area.*
- *1 unit could stand till the beginning of the next rainy season.*
- *17 units very satisfactory, in which a great number of water still existed in the next rainy season.*

1. Tourism Potency Gains Superiority

It is reasonable to say that the field of tourism in this province links very closely to its natural and cultural wealth. This can be viewed from the intensification of these two wealth in the development plan. Devlopment Main Plan in this sector is projected until the year of 2000.

Natural potency appropriate for the intensifaication (as a non-oil/-gas commodity toRegional Government) includes Komodo National Park (Fauna), Three-Colours Lake of Kelimutu and Whale Hunting (in Lembata Island).

Besides, it as also necessary to develop sea parks in Kabupaten Ngada (Riung), Labuhan Bajo, Kabupaten West Sumba, Semaut Island, Kabupaten Kupang and Kabupaten Sikka (in the from of seaside cottages managed by Sao Wisat Ltd.).

Cultural potency also appropriate for the development includes tombstones (megalith), traditional compoongs in West Sumba, Proi Golie in Kabupaten Ende, Moni Village in Kabupaten Ngada, Soa Village in Kabupaten Manggarai (Ruteng) and Labuhan Bajo.

The following details describe the coverage on tourism potency of East Nusa Tenggara acquired by the team of Developing Indonesia :

- *Tourism potency in Timor, Flores and Sumba islands :*

In general Timor is divided in two parts, East and West. The former is an individual province, while the latter belongs to the Province of East Nusa Tenggara and consists of 4 districts (Kabupaten Kupang with the capital of Kupang, Kabupaten Southern Cetral Timor with the capitalof Soe, Kabupaten Northern Central timor with the capital of Kefamenanu and Kabupaten Belu with the capital of Atambus). The extent of West Timor is 16,400.9 km2, while the population living in it (in 1984) amountted to 1,090,382 people - 37% of the total of East Nusa Tenggara people, with a population density of 68 heads per km²2.

Religion followed is specified as follows: Protestantism 59.3%, Catholicism 35%, Islam 3% and the rest for Buddhism and Hinduism. Kupang, which is also the capital of East Nusa Tenggara Province, has an area extent of 25.8 km² and is populated by 105,487 people.

The natural condition of Timor Island is fairly dry and rocky. Rainy season takes place from October/November to March, while summer from April to September/October. The early phases of rain in several parts of Timor, especially in the surroundings of Kupang, make the drying brown eadows become green and fertile so quickly. In the months of June and July the condition of weather is cold enough, and rain frequently occurs in a few parts. In September and October it is hot enough and temperature reaches 35°.

People's income mostly derives from agricultural undertaking. The striking production of natural forest is sandalwood. It is so famous that Timor Islan is called Cendana Island (cendana = sandalwood). This material is manufactured into sandalwood oil and then exported. Besides that, it is utilized for such handicrafts as fan, statue, etc. This area also has natural forest of eucalyptus and is popular for its animals-breeding production (exported cows).

Tourism objects around Kupang and Timor land that can be visited for city tour for one till two days include: Lasiana Beach, 12 km from Kupang, a beach with sands; Baumata, 18 km from Kupang, having a swimming-pool with traditional houses and a centre of fastened-weave handicraft; Camplong, 46 km from Kupang, having tourism forest and clean water source; Baun, 18 km from Kupang, a place of fastened-weave handicraft; Bakunase, 3 km from Kupang, having Cendana Oil Factory; Soe, 110 km from Kupang, an area having fresh air; Oelolok, 217 km from Kupang, a traditional village and a centre of fastened-weave handicraft; Bitauni Cave, 219 km from Kupang, a sacred place for Catholicism adherents; and a few other places around Kupang, Soe and Atambua which have archaeological remains of the second world war such as cannons, hiding caves, etc.

This fact is confirmed by a very successful harvest occuring in Kabupaten Sikka, which was also witnessed by the President and the First Lady of the Republic of Indonesia Mr and Mrs Soeharto.

yang terdiri dari empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Kupang dengan ibukota Kupang, Kabupaten Timor Timur Selatan dengan ibukotanya SoE, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ibukotanya Kefamenanu dan Kabupaten Belu dengan ibukotanya Atambua, Luas wilayah Timor Barat : 16.400,9 Km² dengan jumlah penduduk 1.090.382 jiwa (1984) adalah 37% dari jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur. Dengan tingkat kepadatan penduduk 68 jiwa per Km².

Sementara agama yang dianut 59,3% Protestan, 35% Katholik, 3% Islam dan sisanya Budha dan Hindu. Kota Kupang yang juga merupakan ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai luas 25,8 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 105.487 jiwa.

Keadaan alam Pulau Timor cukup kering dan berbatu karang. Musim hujan dari bulan Oktober/Nopember sampai dengan Maret dan musim kering dari April sampai dengan Oktober/Nopember. Apabila hujan sudah mulai turun di beberapa bagian Pulau Timor khususnya di sekitar Kupang, pergantian dari padang rumput yang berwarna coklat mengering menjadi subur menghijau begitu cepat dan menyolok. Pada bulan Juni dan Juli udara cukup dingin dan di beberapa bagian lain sering turun hujan. Pada bulan September dan Oktober udara cukup panas sampai mencapai 35°.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk bertani. Hasil hutan alam yang terkenal adalah kayu Cendana, sehingga Pulau Timor disebut juga Pulau Cendana. Hasil cendana ini dibuat minyak cendana lalu diekspor. Juga sebagai bahan untuk kerajinan tangan antara lain kipas, patung dan lain-lain. Selain hutan alam cendana terdapat juga hutan alam eucaliptus atau disebut orang pohon kayu putih. Disamping itu Pulau Timor terkenal juga dengan hasil ternaknya, yaitu sapi yang diekspor.

Obyek wisata yang ada di sekitar kota Kupang dan dataran Timor yang dapat dikunjungi untuk city tour atau satu sampai 2 hari tour yaitu : Pantai Lasiana, 12 Km dari Kupang pantai dengan pasir yang putih; Baumata, 18 Km dari kota Kupang terdapat kolam renang dengan gua dalam tanah; Kotabes, 40 Km dari Kupang merupakan desa dengan rumah-rumah tradisional dan pusat kerajinan tenun ikat; Camplong, 46 km dari Kupang terdapat hutan wisata dan sumber air yang jernih; Baun, 18 Km dari Kupang tempat kerajinan tenun ikat; Bakunase, 3 Km dari Kupang terdapat pabrik Minyak Cendana; SoE, 110 Km dari Kupang, suatu daerah dengan udara yang sejuk; OElolok, 217 Km dari Kupang, desa tradisional dan pusat kerajinan tenun ikat; Gua Bitauni, 219 Km dari Kupang, tempat ziarah bagi umat Katholik; Banyak tempat di sekitar kota Kupang, SoE dan Atambua terdapat bekas peninggalan perang dunia kedua, misalnya Meriam dan gua-gua persembunyian bekas perang.

Sementara dalam kunjungan berikutnya adalah di Pulau Flores. Pulau ini merupakan salah satu pulau di antara 556 pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Luas Pulau Flores ialah 17.032 Km² dengan jumlah penduduk 1.341.588 jiwa. Lihat Tabel V-2.

Dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur 1,95% (sensus tahun 1971/1980). Rata-rata curah hujan yang paling tinggi di Manggarai 3.454 mm dan yang paling rendah di Flores Timur 770 mm (data tahun 1984). Pulau Flores Timur cukup subur. Mata pencaharian penduduk yang utama adalah bertani (sawah dan ladang), Penduduk Flores Timur yang beragama Katholik 83%, Islam 11%, Protestan 1,6% dan sisanya Budha dan Hindu. Pulau Flores terletak pada jalur vulkanis, ada beberapa gunung berapi yang masih aktif, antara lain :
Gunung Ebulobo (2.149 m) di Ngada, Gunung Iya (637 m) di Ende, Gunung Rokatenda (3.000 m) di Pulau Palaue, Gunung Lewotobi laki-laki (1.584 m), Lewotobi perempuan (1.704 m) di Flores Timur, Gunung Boleng (1.659 m) di Pulau Adonara dan Ile Ape di Lembata.

Pulau Flores memiliki cukup banyak asset wisata, baik asset wisata budaya maupun alam seperti Taman Nasional Komodo, Tiga Danau berwarna (Kelimutu) dan Upacara-upacara adat serta desa-desa tradisional dengan kebudayaan menggelitiknya.

Sementara di Flores Tengah yang terdiri dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Ende dan Sikka terdapat berbagai potensi wisata. Seperti di Ende :

a. Rumah bekas tempat tinggal Bung Karno Presiden RI yang I pada masa pembuangan, dan sekarang sudah dijadikan sebagai museum, terletak di dalam kota.
b. Tenun ikat Iwan Tirta, sebagai pusat kerajinan tangan/tenun ikat yang desainnya oleh desainer terkenal Iwan Tirta terletak di dalam kota.
c. Kampung Nuabosi, 15 km dari Ende. Karena ketinggiannya, dari sana dapat melihat Kota Ende dan sekitarnya sebagai suatu panorama yang indah.
d. Kampung Wolotopo, 10 km dari Ende, merupakan suatu desa tradisional yang terdapat kerajinan tenun ikat, tari-tarian daerah, rumah dan upacara adat.

2. Flores

This island has an area extand of 17,032 km² and is populated by 1,341,588 people. See Table V - 2.

Tabel / *Table V — 2*

Kabupaten *District*	Ibukota *Capital*	Luas/Km2 *Extent (km 2)*	Jumlah penduduk /jiwa *Total of Inhabitants*
Manggarai	Ruteng	7.136,4	434.626
Ngada	Bajawa	3.037,9	184.072
Ende	Ende	2.046,6	214.015
Sikka	Maumere	1.731,9	240.710
Flores Timur	Larantuka	3.079,2	268.165

East Flores land is fertile enough. People's main income derives from agriculture. In this part religion is specified as follows: Catholicism 83%, Islam 11%, Protestantism 1.6% and the rest for Buddhism and Hinduism. Flores Island lies ia a volcanic line, and several active volcanoes include : Mount Ebulobo (2,149 m) in Ngada, Mount Iya (637 m) in Ende, Mount Rokatende (3,000 m) in Palaue Island, Mount Lewotobi - male (1,584 m), Molunt Lewotobi - female (1,704 m) in East Flores, Mount Boleng (1,659 m) in Adonara Island and Ile Ape in Lembata.

The wealth of tourism (both natural and cultural) in Flores Island is great enough. It includes: Komodo National Park, Three-Colours Lake of Kalimutu, customary ceremonies and traditional villages.

Central Flores, which consists of 2 kabupaten - Ende and Sikka, has such tourism potency as mentioned in the following. In Ende :

a. Ex dwelling-place of Bung Karno (the former president of the Republic of Indonesia), a place of his exile, at present used as a museum, located in the capital.
b. Iwan Tirta fastened-weave, a centre of fastened-weave handicraft the design of which is made by a famous designer - Iwan Tirta, located in the town.
c. Nuabosi Campoong, 15 km from Ende, located in a so high place that Ende and its surroundings can be viewed as a beautiful panorama.
d. Walotopo Campoong, 10 km fromEnde,a traditional village in which fastened-weave handicraft, traditional dance, tribal houses and ceremonies exist.
e. Nduaria Campoong, 45 km from Ende, having traditional houses, megalith culture and a small market packed with people coming from/going to Ende.
f. Mount Kelimutu, having three colourful lakes which have several times undergone a change in colour in this decade, 63 km from Ende.
g. Moni Campoong, a traditional campoong with hot water source,52 km from Ende.
h. Jopu, Nggela and Wolojita Campoongs, famous for their fastened weave handicraft and traditional houses.
i. A veri fasciniating natural panorama which can be enjoyed on the way from Ende to the capital of Sikka, Maumere.

In Maumere:

a. Anthropological minimuseum in Ledalero, 9 km from Maumere.
b. Sikka Campoong, 25 km from Maumere, a centre of Sikka Empire, having an old church with Portuguese design, a centre of fastened-weave handicraft.
c. Lela Campoong, a centre of Catholic mission with church and other buildings having Portuguese design.
d. Nita Campoong, having a number of old elephant's tusks of 2-meters size, a centre of Nita Empire, 10 km from Maumere.
e. Bugis/Wuring Campoong, 4 km from Maumere, a campoong of fhishermen building their houses above the sea surface.
f. Waiara Beach and beaches in Besar Island and Pemana Kaya Island with their sea parks.
g. Women dressed in traditional clothes with a special knot of hair which have been a habit in this area.

In order to be able to enjoy natural and cultural beauty of Maumere, Ende and their surroundigs, we need to spend a period of 5 days/6 nights.

3. Sumba

This island is one of the three big islands in East Nusa Tenggara. It has an area extent of 11,052.4 km² and is populated by 381,938 people spreading in two districts, Kabupaten west Sumba (with the capital of Waikabudak) and Kabupaten Eas Sumba (with the capital of Waingapu). The annual growth rate of population in East Sumba reaches 1.62%, while in West Suma 0.49%. These two kabupaten have the lowest rate of popula-

lewat dari/ke Ende.

f. Gunung Kelimutu dengan Tiga Danau Berwarna yang sudah beberapa kali dalam 10 tahun terakhir ini mengalami perubahan warna, khususnya yang berwarna merah tua kini telah berubah menjadi hijau lumut dan yang berwarna biru kini telah menjadi coklat hitam, jaraknya 63 km dari Ende.
g. Kampung Moni dengan kampung tradisionalnya serta sumber air panasnya, 52 km dari Ende.
h. Kampung Jopu, Nggela dan Wolojita terkenal dengan tenun ikatnya serta rumah/perkampungan dengan umat adat dengan arsitek lokal/lio.
i. Dalam perjalanan dari Ende menuju Maumere kita akan melewati panorama alam yang sangat menarik.

Di Maumere antara lain terdapat potensi seperti :

a. Museum Antropologi mini di Ledalero, 9 km dari Maumere.
b. Kampung Sikka, 25 km dari Maumere terdapat pusat kerajinan Sikka, Gereja Tua dengan arsitek peninggalan zaman Portugis, pusat kerajinan tenun ikat di mana dapat menyaksikan proses menenun dengan pencelupan alam sambil menikmati tari-tarian daerah.
c. Kampung Lela, sebagai pusat misi Katholik dengan gereja dan bangunan-bangunan lain peninggalan zaman Portugis.
d. Kampung Nita, terdapat sejumlah gading gajah tua yang berukuran ± 2 meter, sebagai pusat kerajinan Nita, 10 Km dari Maumere.
e. Kampung Bugis/Wuring, 4 km dari Maumere suatu perkampungan nelayan yang membangun rumah-rumahnya di atas permukaan laut.
f. Pantai Waiara dan pantai-pantai di Pulau Besar, Pulau Pemana Kaya dengan taman lautnya.
g. Suatu kekhasan yang dapat kita lihat di wilayah ini adalah wanita-wanita yang selalu memakai pakaian daerah dengan sanggul yang spesifik. Mereka juga selalu membantu kaum pria dalam mengolah dan membersihkan ladang secara gotong royong.

Untuk dapat mengunjungi dan menyaksikan keindahan alam dan budaya di Maumere, Ende dan sekitarnya kita perlu menghabiskan waktu perjalanan selama 5 hari/6 malam.

Pulau Sumba termasuk di antara 3 pulau besar di Nusa Tenggara Timur, selain Flores dan Timor. Luas Pulau Sumba 11.052,4 Km² dengan jumlah penduduk 381.938 jiwa dan terdiri dari 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat dengan ibukotanya Waikabukak dan Sumba Timur dengan ibukotanya Waingapu. Angka pertumbuhan penduduk untuk Sumba Timur 1,62% dan Sumba Barat 0,49% per tahun. Apabila dilihat dari luas wilayah : Sumba Timur 7.000,5 Km² dan Sumba Barat 4.051,9 Km² dibandingkan dengan jumlah penduduknya masing-masing berjumlah : 132.653 jiwa untuk Sumba Timur dan Sumba Barat 249.259 jiwa, maka Sumba Timur mempunyai angka kepadatan penduduk yang paling rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di seluruh Nusa Tenggara Timur, yaitu: 19 jiwa per km², untuk Sumba Barat 62 jiwa per km².

Sebagian besar penduduk pulau Sumba masih memeluk sesuatu aliran kepercayaan warisan nenek moyang, yaitu Merapu. Di Sumba Barat 57,79% Merapu, 22,29%, Protestan 11,86% Katholik dan 1,8% Islam, sisanya adalah Hindu dan Budha.

Di Sumba Timur: 35,49% Merapu, 58,08% Protestan, 3,86% Katholik, 2,42%% Islam, sisanya Hindu dan Budha.

Pulau Sumba bebas dari gunung berapi karena berada di luar jalur vulkanis dan tidak terdapat gunung yang tinggi. Rata-rata curah hujan di Sumba Barat 1.826 mm dan Sumba Timur 846 mm (data tahun 1984). Sumba Barat lebih subur dan cukup lebat hutannya dibandingkan dengan Sumba Timur yang terdiri dari padang rumput dan steppe. Dan di Pulau Sumba terkenal dengan kuda Sumbawa.

Selain itu di Waikabubak, terdapat 4 (empat) potensi wisata yang cukup menarik, masing-masing:

a. Kampung Tarung, di pinggir Kota Waikabubak, merupakan satu desa tradisional yang masih mempertahankan kebudayaan aslinya dengan upacara-upacara adatnya, misalnya Wulapadu/bulan puasa yang berlangsung pada bulan Nopember dan Desember setiap tahun.
b. Wanokaka, Kodi dan Lamboya, kampung-kampung yang setiap tahun mengadakan Pasola, yaitu suatu permainan rakyat sambil menunggang kuda mereka saling menikam dengan tongkat dari kayu. Peristiwa ini berlangsung pada bulan Pebruari dan Maret.
c. Kampung Laitarung/Anakalang 22 km dari Waikabubak. Ada batu kubur dari batu yang dipahat.
d. Kampung Praigoli, 18 km dari Waikabubak, satu dsa tradisional dengan upacara adatnya.

Sementara di daerah Waingapu, terdapat objek-objek seperti:

ancestors – which is called Merapu. Religion in West Sumba is specifield : 57.79 % Merpu, 22.29% Protestantism, 11.86% Catholicism, 1.78% Islam and the rest for Buddhism and Hinduism, while in East Sumba : 35.49% Merpu, 58.08% Protestantism, 3.86% Catholicism, 2.42% Islam and the rest for Buddhism and Hinduism.

Sumba Island is located outside the volcanic line and has no high mountain. The average rate of rainfall in West Sumba is 1,826 mm, while in East Sumba 846 mm (on the basis of the 1984 data). West Sumba is more fertile than East Sumba and has denser forests. Sumba Island is famous for its Sumbawa horses.

4 kinds of interesting tourism potency existing in Waikabubak include :

a. Tarung Campoong, located on the outskirts of Waikabubak, a traditional village whic still maintains its original culture like Wulapadu (fasting in November and December every year).
b. Wanokaka, Kodi and Lamboya Campoongs, holding "Pasola" annually in February and March.
c. Laitarung/Anakalang Campoong, 22 km from Waikabubak, having chiselled tombstones.
d. Praigoli Campoong, 18 km from Waikabubak, a traditional village withits customary ceremonies.

In Waingapu tourism objects include:

a. Prai Yawang/Pau Village, 64 km from Waingapu, having traditional houses and tombstones and fastened-weave.
b. Rende Umalulu Village, 69 km from Waingapu, a centre of Rende Empire, having traditional houses with wall made from the fleece of water-buffalo, big tombstones and pleating-handicraft products made of fine palm-leaves.
c. Mangili, a centre of fastende-weave handicraft popular for its Kaluda, Kombu which has a very interesting pattern. This fastened-weave has been known widely over the world.
d. Londalima Village, having an attraction of horse dancing under the rhythm of gong or other musical instruments, located 5 km from Waingapu.
e. Kuta Beach, a beach with white sands generally visited by the local people (Waingapu) as a place of seaside recreation, 7 km from Waingapu.
f. Prailiu Campoong, having traditinal houses, tombstones and fastened-weave, located on the outskirts of Waingapu (from Waingapu to the aiport).

East Nusa Tenggara is famous for its epithet "Indonesia in its Miniform". To know the details of this province is very complex. It has approximately 2.7 million spreading in about 111 islands. In addition, geographical condition, language, custom, tribe and religion will be one of the difffilucites in acquiring the details of East Nusa Tenggara.

This province is also popular for its "Paga Natural Disaster", ie starvation disaster occurring in the sub-district of Paga, Kabupaten SIkka.

Governor Ben Mboi stated to the Team of the Developing Indonesia (in December 1986, in Kupang) that in order to organize and manage the existing potency, clever persons with integrated personality are needed. This is reasonable, since East Nusa Tenggara contains hidden potency that must be probed and known.

Development Efforts.

According to Ben Mboi, measuring the success rate of development is the second thing. The is finding out how to gain and develop efforts for reacing the success.

The system of development that has so far been applied is done per district, thus not per sector.

Ben Mboi, born is Ruteng, Flores on May 22, 1935 described that development principaly has the characteristic of multiplying the existing.

A slogan that always planted and flickers in the hearts of development people is "If not us, who else? If not now, when else?"

Nusa Makmur Operation

Nusa Makmur Operation was actually started from 19E. '1)82. It is a particular action aimed at increasing foodstuff production (rice) by means of extension and enhancement of quality.

A positive effect of this operation is that the realization of rice planting has reached 64% (approximately 39,000 Ha) of the target. It is a so startling increase, for in the previous years it only reached an average of 5,000 Ha, while second-crop 3,500 Ha.

Consequently, East Nusa Tenggara, which was formerly known as "A Province of Anxious Food" has changed perfectly and become self-productive.

a. Desa Prai Yawang/Pau, 64 km dari Waingapu, suatu kampung dan rumah adat dengan batu kubur serta tenun ikat.
b. Desa Rende Umalulu, 69 km dari Waingapu, pusat kerajaan Rende, terdapat adat dengan dinding yang dibuat dari kulit kerbau, terdapat batu kubur yang besar, ada juga hasil kerajinan anyaman dari daun lontar yang halus.
c. Mangili sebagai pusat kerajinan tenun ikat yang terkenal yang disebut Kaliuda, Kombu dengan motif yang sangat menarik. tenun ikat Sumba ini sudah terkenal di dunia.
d. Desa Londalima, ada atraksi kuda yang dapat menari mengikuti irama gong atau musik, terletak 5 km dari Waingapu.
e. Pantai Kuta sebagai pantai dengan pasir putih yang sudah biasa dikunjungi oleh penduduk setempat/waingapu sebagai tempat rekreasi pantai, 7 km dari Waingapu.
f. Kampung Prailiu, sebagai centra kerajinan tenun ikat juga terdapat rumah adat dan batu kubur, di pinggir kota Waingapu menuju ke Bandar Udara.

Hadiah "Magsaysay"

Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat julukan populer sebagai "Indonesia Dalam Bentuk Mini" hal ini memang cukup beralasan, sebab untuk mengenal secara mendalam dan menghayati denyut-denyut nadi pembangunan di wilayah ini sangatlah kompleks. Mengenai propinsi ini dari dekat akan mendapatkan kenyataan dengan jumlah penduduk berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa yang tersebar di sekitar seratus sebelas pulau. Disamping itu masih dihadang dengan sulitnya keadaan geografis, perbedaan bahasa, adat istiadat, suku maupun agamanya.

Propinsi ini juga terkenal dengan "Bencana Alam Saga" yaitu bencana alam kelaparan yang menyentuh kecamatan Page di Kabupaten Sikka. Bencana alam ini sangat menyentuh relung-relung kehidupannya khususnya kebutuhan pokok rakyat. Yaitu pangan baik menyangkut kecukupannya, maupun menyangkut kepastian, ketenteraman dan keamanannya.

Oleh karena itulah untuk mengelola dan mengorganisir semua potensi yang ada diperlukan manusia-manusia yang tangguh, pintar mampu mengadaptasi dan mendekatkan diri kepada segenap lapisan masyarakat di daerah ini, demikian antara lain bincang-bincang singkat Gubernur Ben Mboi, dengan Tim Peliputan Indonesia Membangun, di kantor Gubernur/Kepala Daerah Tk I Nusa Tenggara Timur di Kupang bulan Desember 1986.

Memang pernyataan tersebut cukup beralasan dan sangat mendasar, sebab bila melihat potensi daerah Nusa Tenggara Timur pada umumnya terpendam. Keadaan daerah yang berbukit dan terdiri dari bermacam-macam batu karang serta curah hujan yang tidak teratur, menyebabkan terbatas dan memerlukan keuletan dan penataan. Namun demikian dalam memasuki usia yang kedua puluh delapan, masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah dapat menikmati hasil-hasil pembangunan berupa sarana dan prasarana yang menjangkau hingga kepelosok-pelosok pedesaan.

Penghargaan keberhasilan pembangunan di Propinsi yang terkenal dengan "Cendananya" ini memang bukan hanya berasal dari dalan. negeri, bahkan juga dari luar negeri. Terbukti dengan diterimanya hadiah "Magsaysay" untuk pasangan Ben Mboi dan Nafsiah Mboi dari Philipina

Upaya-upaya Pembangunan

Menyinggung masalah seberapa jauh tingkat keberhasilan pembangunan di propinsi Nusa Tenggara Timur, Ben Mboi justru lebih setuju untuk tidak mengukur tingkat keberhasilan dalam bentuk yang dihasilkan, tetapi beliau, mengatakan yang perlu diketahui dan dikembangkan adalah "Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan itu".

Ditambahkannya sistem pembangunan adalah per daerah bukan per sektoral, karena ada sektoral yang tidak berperan, karena kendala-kendala pembangunan tidak semerbak melati dan sepurnama bulan.

Berbincang-bincang di ruang kerjanya, Gubernur yang kelahiran Ruteng, Flores, 22 Mei 1935 itu menggambarkan bahwa pembangunan pada prinsipnya adalah suatu upaya atau usaha yang sifatnya perlipat gandaan (nilai tambah) dari ada menjadi lebih ada (coba you lihat di Pulau Sumba 10 tahun yang lalu, disana tidak ada Luku/bajak, alat untuk membajak sawah red), tetapi sekarang teknologi itu sudah ada dan semakin berkembang. Dan ini menurut Ben Mboi yang namanya proses pembangunan.

Jadi disini yang dipentingkan adalah upayanya untuk mencapai keberhasilan.

Orang selama ini hanya mengatakan tingkat keberhasilan suatu pekerjaan, namun justru lupa mengungkapkan bagaimana upaya dan metoda yang dilaksanakan sehingga berhasil jerih payah yang dilaksanakan. Lebih jauh Gubernur menambahkan, dengan memahami baik kondisi dan potensi daerah secara sadar, baru kita mencanangkan konsepsi pembangunan yang secara strategis dapat memberi jawaban serta mencari upaya untuk memenuhi kehidupan hidup dan kehidupan rakyat. Dalam menggariskan berbagai program yang menyentuh kebutuhan pokok penduduk berpenghasilan rendah, diprioritaskan pembangunan disesuaikan dengan permasalahan di Nusa Tenggara Timur ialah pembangunan bidang Ekonomi dengan penekanan di sektor pertanian.

Menyadari akan kondisi dan keberadaan serta tuntutan tanggung jawab pengabdian yang tinggi dan tulus iklas, maka bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur mempunyai semboyan dan semangat yang ditanamkan dan selalu membara di setiap insan-insan pembangunan adalah "Kalau bukan kita, siapa lagi", kalau bukan sekarang, kapan lagi", ujarnya.

Operasi Nusa Makmur

Operasi Nusa Makmur sesungguhnya dimulai pada dekade tahun 1981/1982, operasi ini merupakan gerakan khusus yang bertujuan meningkatkan produksi pangan/beras melalui perluasan dan peningkatan mutu intensifikasi.

Dampak positif dari Operasi Nusa Makmur adalah realisasi tanam padi mencapai 64% (sekitar 39.000 hektar) dari target. Berarti pula suatu

Livestock Place

Up to the present time East Nusa Tenggara is known as "A Livestock Place", particularly for national consumption. The contribution of this province for national need increase annually.

According to the Head of Animal Husbandry Office of East Nusa Tenggara, drh Ch J Malessy, the breeding of animals by people is up to now still traditional. In 1982, livestock population totalled: 465,935 cows; 141,754 water-buffaloes; 190,028 horses, 823,069 pigs; 318,485 goats; 70,405 sheep and 2,931,696 fowls.

Ironically, the nature of East Nusa Tenggara is neither advantageous nor friendly to animals-breeders, for it has a mountanious and hilly land and a long summer (7 - 8 months). In rainy season, however, grass/green plants are abundant and cannot be finished. Area potency for animals-breeding in this province is great enough - 50.4% of the whole territory, 27,333.6 km2. Yet, not all of them have been utilized for the breeding, becaus the spread of water source is not i equilibrium.

Transmigration Area of Origin

Under the issue of President's Decree No 4 of 19856 - concerning the establishment of Flores, Sumbawa, Alor and Timor (more popular as Flobamor) as transmigration area of origin, Transmigration Office of East Nusa Tenggara in 1987 planned to dispatch 5,000 families. According to the Head of this office, the consideration of making East Nusa Tenggara as and area of transmigrants dispatching has been based on three main factors: the high natality (2.3% per year), the decreasing mortality (0.7% per year) and the improbable capacity of cultivated land plus climate which is not in balance. So as to make land condition and environment be in equilibrium, 100,000 families have to be transmigrated, in order that protected forest in this territory can be maintained. "Larantuka Operation" (summoning 50% of Larantuka people working in Sabah, Malaysia to the back to their original place) is activated for the sake of the nation's name. They then were placed in Arso, Irian Jaya. Larantuka people total approximately 20,000 families, and more than a half of this number work in Malaysia.

Such is the coverage on East Nusa Tenggara Province, a province which is being actively carrying out development program conceptionally and strategically stressed on such sectors as agriculture, cooperatives, health/Family Planning and education.

While the Garuda Airliner started its landing wheels creeping on El Tari landing-strip, a positive expectation for the future blossomed. A few moments passed. In a height of 38,000 feet, a very beautiful but challenging panorama was then sightte. Like a growing rural virgin, East Nusa Tenggara Province needs adorning so that it can be "as fragrant as jasmine and as bright as full moon".

peningkatan yang luar biasa, mengingat pada tahun sebelumnya rata-rata realisasi padi sekitar 5.000 ha dan untuk palawija hanya sekitar 3.500 ha.

Dengan demikian Nusa Tenggara Timur yang pernah mendapat atribut sebagai propinsi "Rawan Pangan", terangkat kepermukaan dan sekaligus menghilangkan citra kurang sedap didengar. Dan kenyataan itu ditandai dengan Panen Raya yang sangat berhasil dalam Operasi Nusa Makmur di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien.

Gudang Ternak

Daerah Nusa Tenggara Timur hingga saat ini terkenal sebagai "Gudang Ternak", terutama bagi konsumsi Nasional. Baik untuk ternak potong maupun ternak bibit. Seperti ternak sapi, kerbau maupun kuda. Sumbangan propinsi Nusa Tenggara Timur untuk memenuhi kebutuhan akan ternak tiap tahunnya terus meningkat.

Sampai sekarang ini, pemeliharaan ternak-ternak itu oleh sebagian besar rakyat masih menggunakan cara tradisional, ujar Kepala Dinas Peternakan drh Ch J Malessy dalam kesempatan menerima Tim Indonesia Membangun.

Menurutnya, populasi ternak tahun 1982, yang terdiri dari sapi: 465.935 ekor, kerbau 141.754 ekor, kuda 190.028 ekor, babi 823.069 ekor, kambing 318.485 ekor, domba 70.405 ekor dan untuk ternak unggas 2.931.696 ekor.

Ironisnya, alam Nusa Tenggara Timur tidak menguntungkan dan kurang ramah bagi para petani ternak, sebab bentuk permukaan tanah penuh dengan gunung dan lembah, disertai musim kemarau panjang (7—8 bulan). Keadaan ini mempengaruhi persediaan rumput/tanaman hijau dan sumber air bagi ternak tiap tahunnya.

Di sini lain, lanjut Kepala Dinas Peternakan NTT, dalam musim hujan justru rumput/tanaman hijau melimpah ruah sampai tidak dapat dihabiskan. Pada musim kemarau hijau rumput/tanaman itu mengering. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya produktivitas (kualitas dan kuantitas) ternak. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasinya ialah dengan "NTT" Livestock Development Project", seperti telah diuraikan dalam penulisan di muka.

Potensi areal yang dapat dimanfaatkan guna pemeliharaan ternak di propinsi ini sangat besar, yaitu sejumlah 59,4% dari luas wilayah 27.333,6 km². Namun demikian, belum seluruh areal itu dapat dimanfaatkan. Ini disebabkan tidak meratanya penyebaran sumber air, ungkapnya.

Pendapat senada tentang potensi ternak juga diberikan ketua BKPMD Nusa Tenggara Timur, Drs Markus Didock. Mengenai potensi ternak sebagai penyumbang kebutuhan Nasional. Penanaman modal di propinsi ini dapat dikategorikan dalam 4 kelompok besar. Diantaranya yang utama di bidang peternakan, kehutanan, pertanian dan pertambangan. Keempat potensi tersebut mempunyai prospek yang cerah dan besar dimasa mendatang.

Untuk bahan tambang misalnya, terdiri dari gips, belerang, crone dan batubara. Sedang di bidang pertanian (sub sektor perikanan) seperti, ikan tuna, udang (budidaya), cumi-cumi, tripang dan mutiara.

Daerah Asal Transmigrasi

Dengan dikeluarkannya KEPPRES Nomor 4 tahun 1986 tentang penetapan pulau-pulau Flores, Sumbawa, Alor dan Timor atau lebih dikenal dengan singkatan "Flobamor" sebagai daerah asal transmigran, pihak Kanwil Transmigrasi Nusa Tenggara Timur dalam tahun 1987 merencanakan mengirim 5000 KK. Menurut Ka Kanwil Transmigrasi, pertimbangan dijadikannya NTT sebagai daerah pengirim transmigran, karena 3 faktor utama. Yaitu tingkat kelahiran masih tinggi 2,3% per tahun, sementara untuk tingkat kematian justru sebaliknya menurun sebesar 0,7% pertahunnya, yang ketiga daya dukung lahan tidak memungkinkan lagi ditambah iklim yang seimbang. Agar kondisi lahan dari daya dukung lingkungan seimbang harus ditransmigrasikan 1880.000 KK. Yang dimaksud adalah, agar hutan lindung yang ada di daerah itu, yang dihuni masyarakat terjaga kelestariannya. Digalakkannya "Operasi Larantuka" yaitu memanggil sekitar 50% penduduk Larantuka yang bekerja di Malaysia (kota Sabah) untuk kembali ke daerahnya adalah demi nama baik bangsa dan selanjutnya ditempatkan di daerah penerima, seperti Arso di Irian Jaya, merupakan salah satu alternatif utama. Penduduk Larantuka sekitar 20.000 KK, separuhnya lebih ada di negara tetangga Malaysia umumnya bekerja sebagai buruh perkebunan sawit.

Tanpa terasa mengakhiri liputan di daerah yang sedang giat-giatnya membangun dalam menyongsong era tinggal landas utamanya dalam Pelita IV yang secara konsepsional dan strategis diutamakan di sektor-sektor pertanian, perkoperasian, kesehatan/KB dan Pendidikan, mencuatkan harapan positif di masa mendatang. Dan ketika derak-derak roda pesawat Garuda Indonesia Airways mulai melaju di landasan pacu "El tari" terkenang akan derasnya roda-roda pembangunan berputar di bumi **Cendana** yang menuntut perjuangan tanpa kenal lelah, dari insan-insan pembangunan. Dari ketinggian 38.000 kaki/feet atau 9 kilometer seperti diumumkan pramugari dalam kabin, dari jendela pesawat, nampak tergambar panorama indah namun keras dan menantang.

Begitulah ibaratnya, Nusa Tenggara Timur, bak gadis desa yang perlu didandani agar "Semerbak melati dan Seterang bulan purnama".
***

Propinsi MALUKU



SULAWESI UTARA

P.DOI
P.RAU
Tg.Sopi
Berebere
P.MOROTAI
Wayabula
Daruba
Sabatai
Susupu
Limau
Lapi
Tg.Goajojaru
Galela
Tg.Gila
Tg.Tumuo
G.TOBARU
TOGOHI
Labilabi
Tg.Kalupa
Tg.Lelai
Lolobata
Akelamo
Jailolo
P.TERNATE
TERNATE
Wazile
G.ISALAI
Tg.Wayamli
P.TIDORE
Oba
Buli
Watam
P.MARE
SOASIU
BT.SULAT
Maba
P.HALMAHERA
P.MOTI
Lukulamo
P.MAKIAN
Payahe
Gotowasi
P.SUYAFI
P.KAYOA
Weda
Sepo
BUKITTAJAM
Gemia
P.TANETI
Maidi
Mafa
P.MUARI
Meloku
BT.BUKU
Tg.Ngolopapo
Patani
Palamea
Ruta
P.KASIRUTA
Yaba
Cenga
Marikoko
Sakata
P.BACAN
P.YU
P.GEBE
Kacepi
P.MANDIOLI
Busu
Penambuan
BT.SIBELA
Lemolemo
Silang
Gunedidalem
KEP. SULA
P.TALIABU
Penu
P.TAPAT
P.BISA
Tg.Libobo
Kayasa
Samuya
Dofa
P.MANGOLE
P.OBILAT
P.DAMAR
Tg.Pandara
Laiwui
Kawasi
P.OBI
Tg.Dehekolano
Wailowen
Sanana
P.SULABESI
Tg.Waka

LAUT MALUKU
LAUT HALMAHERA
LAUT SERAM

Tg.Palpetu
P.BOANO
Tg.Taduru
Kawa
Tg.Namea
P.BURU
Namlea
P.MANIPA
Tg.Pumali
Wahai
Tg.Batauposkat
P.KELANG
Piru
Tanahgoyang
Tg.Sanputih
Wahakayim
Leksula
Waisisi
Rumahakat
Amaha
Roho
Setole
MASOHI
Tg.Lama
P.AMBON
Moreala
P.HARUKU
Saparua
Laimu
Hoti
Alang
AMBON
PATTIMURA
P.SAPARUA
Haya
Adabai Bula
Tg.Mer
P.NUSALAUT
P.SERAM
Waru
Tg.Masia
Werinama
Kiliboni
Gufar
Undur
Amanu
Gulegule
P.GESER
Geser
KEP.GORONG
KEP.BANDA
P.PANJANG
P.GUNUNGAPI
P.MANAWOKA
P.GORONG
P.ROZENGAIN
KEP.WATUBELA
P.WATUBELA
P.KASIUI
P.TIOR

IRIAN JAYA

LAUT BANDA

P.MANUK
P.KUR
KEP. KAI
P.TIYANDU
Tg.Borang
P.WALLIR
P.KAIDULAH
DAMATUBUN
P.NUHUCUT
TUAL
Elat
P.SERUA
P.NUHUROWA
P.WASIR
P.UJIR
P.WAMAR
Tg.Waduar
KEP. ARU
KEP. DAMAR
P.NILA
P.WETAR
Wasiri
Tg.Fatujuring
P.WOKAM
Napar
Sutiralan
P.ROMA
P.MAIKOOR
Kobrour
Nangu
Liopa
P.DAMAR
Melukua
P.TAUN
Tabarfane
Kuru
Arwala
Hila
Wulur
Rebi
P.PENAMBULI
Limaro
Naus
P.TERBANG UTARA
P.TANGAN
P.LIRAN
Hotpass
Masapun
Ujung Wakeke
P.TERBANG SELATAN
Tg.Lelai
Juring
Wonreli
P.KISAR
KEP.LETTI
Tg.Waarlangir
Larat
Kilaan
Ngaibor
Lainirir
WOKAI
P.MOA
Kaiwattu
P.LARAT
P.LETI
KEP. TANIMBA
Lamdesar
Tg.Ngabordamlu
P.PENJURING
TIMOR TIMUR
Serwaru
Patti
Lokat
Ramdara
Tepa
Makatian
P.ENU
KEP. JIN
P.LAKOR
Walluku
Nanglus
P.YAMDENA
Amdassa
Wasietan
Saumlaki
Adaut
Latman
LAUT TIMOR
LAUT ARAFURU

B A B / *CHAPTER I*

M O N O G R A F I / *MONOGRAPHY*

1. Keadaan Alam

PROPINSI Daerah Tingkat I Maluku secara astronomi terletak antara 5° Lintang Utara - 8° Lintang Selatan dan 24° Bujur Timur — 135° Bujur Timur. Sedangkan secara geografis sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah Timur dengan Propinsi Irian Jaya, sebelah Selatan dengan Laut Timur dan Laut Arafura serta di sebelah Barat dengan Pulau Sulawesi.

Bila dilihat dari sudut bentangan geografisnya, Propinsi Maluku merupakan sebuah Propinsi yang cukup luas yaitu sebesar 851.000 Km². Luas wilayah tersebut terdiri dari lautan 765.272 Km² dan daratan 728 Km². Bila diambil perbandingannya antara luas lautan dan daratan berkisar 9 : 1.

Maluku merupakan salah satu Propinsi yang terdiri dari hampir seribu buah pulau. Begitu banyaknya pulau di Propinsi Maluku daerah ini sering dijuluki "Daerah Seribu Pulau".

Sedangkan bila ditarik dari garis Khatulistiwa, wilayah Maluku terbagi dua bagian yaitu, sekitar ¾ bagiannya terletak dibelahan bumi Selatan dan sekitar ¼ bagian lainnya terletak dibelahan bumi Utara.

Secara geografis daerah Maluku dibentuk oleh relief yang besar dimana palung laut dan punggung pegunungan silih berganti secara menyolok. Pada umumnya daratan Maluku menjulang langsung dari permukaan laut sehingga memberikan bentangan alam yang spesifik dengan tanjung dan teluk-teluk yang menyolok.

Keadaan demikian sangat dipengaruhi oleh kedudukan geologis Kepulauan Maluku. Di sini terjadi pertemuan antara sistem orogenetik lingkar Pasifik dengan sistem orogenetik Sunda. Proses pembentukan pegunungan di daerah ini masih aktif, karena mengandung rangkaian lipatan muda.

Setiap tahun laut di wilayah Maluku dapat dilayari dengan aman selama dua periode yaitu : Maret — April dan Oktober — Nopember.

Dari sekian banyak laut di Maluku, antara lain laut Banda (± 450.000 Km²) yang terluas sekaligus laut yang terdalam di Indonesia dengan titik terdalam sekitar ± 7.405 m. Titik laut terdalam ini terletak di sekitar pulau Manuk, Teon, Nila, Sarua dan Damar di gugusan pulau-pulau Kei dan Tanimbar.

Maluku hampir tidak mempunyai banyak sungai yang besar dan terkenal seperti di daerah lain. Hal ini disebabkan pulau-pulau yang agak besar di Maluku relatif kecil, sehingga sungai-sungai besar dan panjangpun amat terbatas. Sungai yang besar dan panjang sampai dengan ± 50 Km terdapat di pulau besar seperti : Pulau Halmahera, Seram, Buru, Obi, Taliabu, Mangoli, Tanimbar, dan Aru. Sedang pada pulau-pulau yang kecil sungainya juga relatif kecil dan pendek.

Sebagian dari sungai-sungai di Propinsi Maluku mempunyai ciri air susut bila musim kemarau dan bila musim penghujan air meluap (banjir). Hal ini mungkin disebabkan, karena kurang terpeliharanya hutan. Apalagi jika dilihat potensi sumber air yang ada di Maluku, diperoleh gambaran potensi sumber air di daerah Maluku Tenggara sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan Daerah Tingkat II lainnya, seperti Maluku Utara dan Maluku Tengah.

Bagi pulau-pulau kecil di daerah Maluku Tenggara, air merupakan problema bila datang musim kemarau panjang. Pulau kecil yang dimaksud antara lain: Pulau Leti, Moa, Lakor, Roma dan Kisar. Sedangkan pulau-pulau lainnya di daerah Maluku Tenggara seperti Kei, Aru dan sebagainya potensi sumber airnya boleh dikatakan cukup.

Untuk sungai-sungai yang dapat dilayari oleh perahu motor ukuran kecil, hanya beberapa sungai saja yaitu antara lain: sungai Akelamo, Jailolo dan Kao di pulau Halmahera; sungai Wainapu di Pulau Buru dan sungai Masiwang di pulau Seram. Selain itu, ada beberapa sungai yang diperkirakan dapat dikembangkan untuk tenaga Hidrolishit seperti: Akelamo, Kao, Kedi, Maba, Weda di pulau Halmahera dan sungai di daerah Kairatu, Laimu, Tehoru dan Wahai di pulau Seram.

Hanya ada beberapa pulau saja di Maluku yang potensi sumber air sungainya dapat dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat banyak.

Walaupun demikian, selain dari potensi sumber air sungai, banyaknya danau di Propinsi Maluku juga perlu diketahui yaitu ± 39 buah dengan ukuran kecil sampai sedang. Sedang luas secara keseluruhan meliputi ± 5.000 Ha. Tersebar di daerah Maluku Utara 2.100 Ha, Halmahera Tengah 50 Ha, Maluku Tengah 2.700 Ha dan Maluku Tenggara 100 Ha.

Tidak berbeda dengan propinsi lainnya, Propinsi Maluku juga tidak terlepas dari gugusan gunung-gunung yang terdapat hampir di seluruh Kabupaten/Kotamadya. Antara lain: gunung Gamalama di pulau Ter-

1. Geography

FROM the point of astronomical view the Province of Moluccas is situated between 5° north latitude - 8° south latitude, and between 24° east lognitude - 135° east longitude. From the point of geographical view the Moluccas is bordering with the Pacific Ocean in the north, with Irian Jaya in the eastern side, with the Timor Sea and the Arafuru Sea in the southern side, while in the western side it is bordering with the Island of Sulawesi.

Looked from its geographical spatial area, the Province of Moluccas is a province of wide enough area covering 851.000 km2. The width of this region is consisting of 765.272 km2 sea water, and 728 km2 land area. If we compare the sea water and the land area, the ratio would be 9 : 1.

The Moluccas is one of the provinces consisting of nearly one thousand islands. There are so many islands situated in this province of the Moluccas so that people sometimes give to it the nickname of "The Region of Thousand Island"

If we draw the equatorial line, then the Province of Moluccas would be divided into two parts, about ¾ of its part is situated in the northern hemisphere and about ¼ of its part is situated in the southern hemisphere.

Geographically the region of the Moluccas is formed by great reliefs on which sea beds an mountain ranges vary remarkably here and there. In general the land area of the Moluccas soars up directly out of the sea surface, giving a specific natural scenery, studded with capes and bays of remarkable view.

Such a condition is mostly affected by the geological position of the Moluccas. Here we find the intersection of the orogenetic system of the Pacific Circumference and the orogenetic system of the Sunda Isles. the process of mountain formation in this area is still active because the area yields many creases of young earth crust.

Every year the seas around the Moluccas can be sailed safely during two periods : March - April, and October - November.

Of the so many seas surrounding the Moluccas, the Banda Sea is the widest one (about 450.000 km2), simultaneously being the deepest sea in Indonesia with the deppest point at 7.405 m. This deepest point of the sea is situated around the islands of Manuk, Teon, Nila, Sarua and Damar belonging to the Kei and Tanimbar islands group.

The Moluccas is nearly not in the possession of great rivers and well-known as in other provinces. This is due to the greatest islands condition in Moluccas ara relative small, so that big and long rivers here are quite limited. The big and long rivers of about 50 km are found in the islands of Halmahera, Seram, Buru, Obi, Taliabu, Mangoli, Tanimbar and Aru. While in other small islands the rivers are also small and short.

Most of the rivers in the province of Moluccas have no constant water, as they become dry during the long draught while during the rainy season the water is flooding. This fact is due to the lack of forest maintenance. Moreover if we take into consideration the water potentiality source in the Moluccas, we can get a picture the water potentiality in the area of Southeast Moluccas is lesser in water debits in comparison with those in the area of other districts, such as North Moluccas and Central Moluccas.

For the small islands in the region of Southeast Moluccas, water is a big problem if long draught is overwhelming. The small islands concerned among others : The islands of Leti, Mue, Lakor, Roma and Kisar, while in other islands in the region of Southeast Moluccas such as Kei, Aru, etc. the water potentiality is more than enough.

For the rivers being able to be sailed by motorboats of small size, only some rivers are suitable, among others, the river of Akelamo, the river of Jailolo, and the river of Kao on the island of Halmahera ; the river of Wainapu on the island of Buru, and the riever of Masiwang on the island of Seram. Besides that there are some rivers that can be developend into hydro-power stations like the river of Akelamo, the river of Kao, the river of Kedi, the river of Maba, and the river of Weda on the island of Halmahera, and the river in the region of Kairatu, Laimu, Tehoru, and Wahai on the island of Seram.

Only some islands in the Moluccas of which the water potentiality can be utilized for the benefit of the public.

Nevertheless except the potentiality of the river water resource, there are also a number of lakes in the province of Moluccas comprising about 39 lakes of small and mediocre size. The aggregate area is covering about 5.000 ha, scattered about the North Moluccas 2.100 ha, the Central Halmahera region 50 ha, the Central Moluccas 2.700 ha, and Southeast Moluccas 100 ha.

nate dengan tinggi 1.715 m; gunung api Banda dengan tinggi 667 m; gunung Salahutu di pulau Ambon dengan tinggi 1.038 m; gunung Binaya di pulau Seram dengan tinggi 3.055 m dan gunung ini merupakan gunung tertinggi di Propinsi Maluku.

Beberapa buah pulau yang penting antara lain Pulau Morotai (1.800 Km²), Pulau Halmahera (18.000 Km²), Pulau Ternate (116 Km²), Pulau Obi (3.700 Km²), kepulauan Bacan (5.700 Km²), Pulau Seram (18.625 Km²), Pulau Ambon (761 Km²), Kepulauan Aru (6.325 Km²), Pulau Buru (9.000 Km²), Pulau Yamdena (5.058 Km²) dan Pulau Wetar (3.624 Km²).

Sebagian besar pulau-pulaunya dapat diklasifikasikan sebagai pulau vulkanis dan karang. Kurang lebih 85% merupakan kawasan bergelombang sampai bergunung dengan kemiringan 15 sampai lebih 25%. Sedangkan sisanya merupakan kawasan relatif datar sampai berombak (15%) dengan kemiringan lahannya 0 - 8%.

Dataran rendah hanya terdapat pada daerah-daerah seperti Morotai, Halmahera, Obi, Seram, Buru dan Aru, Tanimbar. Beberapa dataran rendah yang penting antara lain: dataran Kao, Waitina dan Kairatu. Jenis tanah di daerah ini sangat bervariasi antara lain terdapat tanah Litosal yang meliputi 45% wilayah Maluku, tanah Podsolik 20%, renzina 10%, Latosal 10% dan lain-lain 15%.

Formasi batuan yang membentuk pulau-pulau di Maluku menurut penjelasan dalam "Geologic Map of Indonesia - East Half" dari Direktorat Geologi Indonesia, pesisir Utara, Barat & Selatan pulau Morotai umumnya dibentuk oleh batuan Aluvium, undak & terumbu koral. Pesisir timurnya dibentuk oleh bantuan basa dan sedikit neogen.

Lengan utara pulau Halmahera dibentuk oleh batuan basa dikelilingi oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral dan pada ujung Utara sekali pesisir Barat lengan tersebut dibentuk oleh batuan permo-karbon, pesisir Timur oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral. Pesisir lengan Timur Laut Halmahera dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, sedikit batuan basa dan neogen di daerah pedalaman. Lengan Tenggara Halmahera umumnya dibentuk oleh batuan neogen, batuan basa, batuan aluvium, undak & terumbu koral. Lengan Selatan umumnya dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, pesisir Baratnya dibentuk oleh batuan basa. Halmahera Tengah dibentuk oleh batuan basa menengah, sedikit neogen dan batuan aluvium, undak & terumbu koral.

Pulau-pulau di sebelah Barat Halmahera, dari Ternate Makian dibentuk oleh batuan permo-karbon, Kayoa & sekitarnya dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, sedikit basa menengah dan neogen.

Kepulauan Bacan umumnya dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, sedikit batuan basa pada pesisir barat, sedikit neogen & sekis hablur dibagian tengah, sedangkan batuan basa menengah terdapat tersebar-sebar.

Pesisir Utara dan Baratnya pulau Obi dibentuk oleh sedikit batuan aluvium, undak & terumbu koral, sedikit batuan basa pada pesisir Timur-Laut & Barat.

Pulau Gebe dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, dan batuan basa.

Kepulauan Sula dibentuk oleh beberapa jenis batuan yang tersebar-sebar, antara lain di pulau Taliabu terdapat sedikit batuan basa menengah, kapur, neogen (pulau Sehu) dan sekis hablur, di pulau Mangoli terdapat sedikit batuan kapur, basa menengah, batuan aluvium, undak & terumbu koral (P. Lafamatola), di pulau Sulabesi (Sanana) terdapat batuan sekis hablur, sedikit neogen, sedikit batuan aluvium, undak & terumbu koral.

Pesisir Timur Laut, Barat Laut dan Barat Daya pulau Buru dibentuk oleh sedikit batuan aluvium, undak & terumbu koral, sekis hablur dan trias tersebar-sebar; sedikit neogen dan sedikit kapur.

Pesisir sekeliling pulau Seram umumnya oleh batuan neogen, dan diselang-selang oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral. Seram Timur umumnya dibentuk oleh trias & sedikit sekis hablur. Seram Tengah umumnya dibentuk oleh trias, sedikit sekis hablur, sedikit grauwack & serpih, dan sedikit meozoikum tak dibedakan, sedangkan Seram Barat umumnya dibentuk oleh sekis hablur dan trias, sedikit grauwack & serpih, sedikit meozoikum tak dibedakan dan sedikit batuan basa.

Pulau Ambon dan Lease umumnya dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, sedikit basa menengah di Leinitu, sedikit basa, basa menengah dan trias di Lei-Timur, sedikit permo-karbon di Lease.

Kepulauan Banda umumnya dibentuk oleh batuan basa menengah.

Pulau-pulau Kei Kecil umumnya dibentuk oleh batuan neogen, sedangkan pulau-pulau Kei Besar umumnya dibentuk oleh batuan paleogen, sedikit neogen, sedikit aluvium, undak dan terumbu koral.

Kepulauan Aru umumnya dibentuk oleh batuan neogen, sedangkan batuan aluvium, undak & terumbu koral terdapat sedikit di pesisir.

Like in the other provinces, the province of Moluccas is not free from mountain ranges which are nearly found in every district/municipality, among others : the mountain of Gamalama on the island of Ternate with the height of 1.715 m ; the volcano of Band with the height of 667 m ; the mountain of Salahutu on the island of Ambon with the height of 1.038 m ; the mountain of Binaya on the island of Seram with the height of 3.035 m and this mountain is the highest mountain in the province of Moluccas.

Some important islands, among others are the island of Morotai (1.800 km2), the island of Halmahera (18.000 km2), the island of Ternate (116 km2), the island of Obi (3.700 km2), the island of Bacan (5.700 km2), the island of Seram (18.625 km2), the island of Ambon (761 km2), the Aru islands group (6.325 km2), the island of Buru (9.000 km2), the island of Yamdena (5.058 km2) and the island of Wetar (3.624 km2).

Most of the islands can be classified into volcanic and reef islands. About 85% of the region are hilly and mountainous with a slanting altitude of 15 to 25 %, while the rest are flat ralative land area to mountaineous (15%) with a slanting area of 0 - 8 %.

The lower plain are only found in the regions like Morotai, Halmaheira, Obi, Seram, Buru and Aru, Tanimbar. Some of the important plains are among others : The plain of Kao, the plain of Waitina, and Kairatu. The type of soil in this area is consisting of many varieties, among others the soil belonging to the type of litosal covering 45% the region of Moluccas, the Podsolic type 20% and renzina type 10%, latosal type 10%, and other types 15%.

The rock formation comprising the Moluccas archipelago according to the information stipulated on the "Geologic Map of Indonesia - Half East" from the Indonesian Directorate of Geology, the northern, western, and southern coast of the island of Morotai in general consist of alluvium, and cliffs, and coral reefs. The eastern coast is formed by basalt rocks and a little neogen.

The northern peninsula of the island of Halmahera is formed by basalt rocks surrounded by alluvial rocks, cliffs and coral reefs, and at the utmost northern point of the western coast of the same peninsula the land is formed by the permo-carbonic rocks, the eastern coast by alluvial rocks, cliffs and coral reefs. The coast of the eastern peninsula of Halmahera is formed by the alluvial rocks, cliffs and coral reefs, a few basalt rocks and neogen in the island areas. The southeastern peninsula of Halmahera is in general formed by neogenic rocks, basalt rocks, alluvial rocks, cliffs and coral reefs. The southern peninsula of Halmahera is in general formed by alluvial rocks, cliffs and coral reefs, while the western coast of it is formed by basalt rocks. The Central Halmahera region is formed by medieval basalt rocks, a little neogen, and a little alluvial rocks, cliffs and coral reefs.

The islands situated in the western side of Halmahera, from Ternate to Makian, are formed by permo-carbonic rocks, Kayoa and its surroundings formed by alluvial rocks, cliffs and coral reefs, a little medieval basalt rocks and neogen.

The Bacan islands group are in general formed by alluvial rocks, cliffs and coral reefs, a little basalt rocks at the western coast, a little neogen and a type of rock crystal in the middle part, while the medieval basalt rocks are found scattered.

the northern and western coas of Obi island are formed by a few alluvial rocks, cliffs and coral reefs. a little basalt rocks at the northeastern and western coast.

The island of Gebe is formed by the alluvial rocks, cliffs and coral reefs, and basalt rocks.

The Sula islands group are formed by several types of rocks, scattered here and there, among others on the island of Taliabu there is found a few medieaval basalt rocks, lime stones, neogen (the island of Sehu) and a type of rock crystal, on the island of Mangoli is found a little lime stone rocks, medieval basalt rocks, alluvial rocks, cliffs and coral reefs (the island of Lafamatola), on the island of Sulabesi (Sanan) there is found a type of rock crystal, a little neogen, a little alluvial rocks, cliffs and coral rocks.

The northeastern coast, southwestern and northwestern part of Buru island are formed by a little alluvial rocks, cliffs and coral rocks, a type of rock crystal and trias scattered ; a little neogen, and a little limestome.

The coast around the Seram island in general is formed by neogen rocks, and interrupted here and there by alluvial rocks, cliffs and coral reefs. East Seram is formed by trias and a little rock crystal. Central Seam is in general formed by trias, a little rock crystal, a little grauwack, and splinter, and neozoicum indifferent, while western Seram in general is formed by rock crystal and trias, a little grauwack and splinter, a little meozoicum indifferent, and a little basalt rocks.

The Ambon and Lease islands are in general formed by the alluvial rocks, cliffs and coral reefs, a little medieval basalt rocks at Leinitu, a little basalt

Kepulauan Tanimbar umumnya dibentuk oleh batuan aluvium, undak & terumbu koral, meozoikum tak dibedakan dan neogen.

Pulau Babar umumnya dibentuk oleh batuan meozoikum tak dibedakan, pulau Sermata oleh sekis hablur, pulau Lakor oleh aluvium, undak & terumbu koral, pulau-pulau Moa oleh sekis hablur, pulau Leti oleh permo-karbon, pulau Kisar oleh sekis hablur.

Pulau Wetar, Romang, Damar, Teon—Nila—Serua dibentuk oleh batuan basa menengah.

Sebagian besar tanah-tanah di Maluku terdiri dari tanah-tanah komplex, brown forest soil, tanah latosol, tanah renzina, tanah aluvial dan tanah Mediteran.

Dari semua jenis tanah ini yang paling dominan tersebar ialah : Tanah komplex, yang meliputi: 30% P. Seram, 70% P. Obi, 50% P. Buru, 20% Kep. Tanimbar, 20% P. Morotai dan 20% Halmahera Tengah. Brown forest soil, yang meliputi: 75% P. Ambon, 40% P. Lease, 50% P. Seram, 10% P. Obi, 20% Kep. Kei, 20% Kep. Tanimbar, 50% Kep. Sula dan 20% P. Halmahera dan 60% P. Dobo. Tanah latoso yang meliputi: 20% P. Halmahera, 90% Kep. Bacan dan 20% P. Buru P. Buru. Tanah renzina, yang meliputi: 40% Kep. Kei, 20% Kep. Tanimbar, dan 20% P. Morotai. Tanah Mediteran, yang meliputi: 30% Kep. Kei, 25% Kep. Tanimbar, 90% Pp. Kisar, 30% Halmahera dan 40% Pp. Lease.

Hingga kini berdasarkan data yang diketahui bahan galian yang ada antara lain: Minyak bumi di Bula (Seram Timur), Mangaan di pulau Doi (Maluku Utara), Nikkel di pulau Obi dan Gebe (Maluku Utara), Belerang dikepulauan Teon, Nila, Serua dan P. Manuk (Maluku Tengah/Tenggara), Kwarsit di pulau Taliabu, Bauxit di Seram Timur, Obi dan Taliabu, Asbes di Gane Timur dan Weda, Minyak bumi di Ekor, Bacan, Obi, Mangoli Yamdena dan Aru. Biji besi di kepulauan Bobon.

Laut Maluku yang terletak di bagian Barat Laut mempunyai hubungan dengan samudera Pasifik melalui gerbang luas yang terletak diantara pulau Morotai dan pulau Kaburuang (salah satu dari P. Taulud).

Alur penghubung antara laut dan samudera tersebut mempunyai kedalaman sebesar 1.400 M untuk beralih ke kedalaman yang lebih besar di lautan Teduh. Titik terdalam pada laut Maluku, terletak kurang lebih 20 mil sebelah Barat Daya Mandioli. Sedangkan alur penghubung dengan laut Seram terletak antara pulau Lifumatola dan pulau Obi Mayor dengan titik terdalam sekitar lebih dari 14.000 M.

Laut Seram yang terletak di sebelah Utara pulau Seram dan Buru berhubungan dengan laut Halmahera melalui pintu yang relatif dangkal. Terletak diantara selat Tobalai dengan pulau Batame (Missol). Sedangkan dengan bagian Barat Laut, laut Banda melalui gerbang yang terletak diantara ujung Selatan pulau Sanama dan ujung Barat Laut Pulau Buru (sekitar Teluk Bara). Titik terdalam gerbang ini, adalah lebih dari 3.000 M. Untuk beralih pada basin Banda bagian Barat Laut yang berkedalaman melebihi 5.000 M. Sedangkan dengan bagian Tengah basin Banda melalui selat-selat Manipa dan Kelang dengan kedalaman melebihi 500 M. Melalui cela-cela diantara P. Gorom, laut tersebut berhubungan dengan bagian timur laut Banda. Sedangkan dengan laut Arafura melalui jalur yang terletak diantara bagian Utara Nuhu Cut (P. Kei) dan selat Adi (Irian Jaya) yang berkedalaman lebih dari 2.000 M. Titik terdalam dari laut Ceram, yakni lebih dari 4.500 M letaknya ditengah-tengah antara selat Boano dan pulau Obi Mayor.

Laut Halmahera yang terletak di Utara Daerah Maluku, membasahi terutama pantai Timur Laut dan Timur pulau Halmahera dan berhubungan langsung dengan Samudera Pasifik. Laut tersebut dapat digolongkan sebagai laut "tepi" (meskipun tidak dalam arti yang sebenarnya).

Laut Banda dapat dibagi dalam tiga basin utama: (a) Basin Barat Laut, laut Banda. Basin ini terletak dibagian Barat Laut, laut Banda, dan dikelilingi oleh pulau-pulau Buru, Sula, Banggai dan pantai Timur Sulawesi Tenggara. Kedalaman dibagian tengah sebagian melebihi 5.000 M. (b) Basin Sentral Laut Banda, merupakan bagian terbesar dari laut Banda. Sesuai dengan namanya letaknya ditengah-tengah diantara gugusan pulau Seram, Buru dibagian utara, gugusan pulau-pulau Banda, Manuk, Nila, Serua, Teon dan Damar dibagian Timur dan gugusan Pp. Terbang, Sermata dan Wetar dibagian Selatan, sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan laut Flores, P. Tukang Besi, Muna dan Buton.

Pada basin sentral ini sebagian dari lembah-lembahnya yang terletak ditengah-tengah memiliki kedalaman lebih dari 4.000 M. Sedangkan titik terdalam terdapat di sebelah Tenggara Pp. Lucipara (± 5.000 M).

Kedalaman Weber adalah bagian dari laut Banda yang letaknya diapit oleh Pp. Manuk, Nila, Serua. Teon dan Damar dibagian Barat dan gugusan Pp. Kei dan Tanimbar dibagian Timur. Di sini terdapat kedalaman-kedalaman yang melebihi 7.000 M. yang letaknya terutama antara pulau Manuk dan gugusan pulau Manggur. Daerah ini merupakan daerah yang terdalam di seluruh perairan Indonesia dengan

rocks, medieval basalt rocks and trias at Lei Timur, a little permo-carbonic at Lease.

The Banda island group are in general formed by the medieval basalt rocks.

The Lesser Kei Islands are in general formed by the neogen rocks, while the Major Kei Islands are in general formed by palaegenic rocks, a little neogen, a little alluvium, cliffs and coral reefs.

The Aru islands group are in general formed by neogenic rocks, while the alluvial rocks, cliffs and coral reefs are found a little bit on the coasts.

The Tanimbar islands group are in general formed by alluvial rocks, cliffs and coral reefs, meozoicum indifferent, and neogen.

The island of Babar is in general formed by meozoicum indifferent, the island of Sermata by a type of rock crystal, the island of Lakor by alluvium, cliffs and coral reefs, the islands of Moa by rock crystal, the island of Leti by permo-carbon, the island of Kisar by a rock cyrstal.

The island of Wetar, Romang, Damar, Teon-Nila-Serua are formed by medieval basalt rocks.

The most parts of the soil in Moluccas consist of complex soil, brown forest soil, latosol soil, renzina soil, alluvial soil, and mediteranean soil.

From all these types of soil the most dominant scattered is : the complex soil, covering 30% the island of Seram, 70% the island of Obi, 50% the island of Buru, 20% the islands group of Tanimbar, 20% the island of Morotai, and 20% Central Halmahera. Brown-forest soil covering 75% the island of Ambon, 40% the island of Lease, 50% the island of Seram, 10% the island of Obi, 20% the Kei islands group, 20% the Tanimbar islands group, 50% the islands group of Sula, 20% the island of Halmahera, and 60% the island of Dobo. The latosol soil covering 20% the island of Halmahera, 90% the Bacan islands group, and 20% the island of Buru. The renzine soil covering 40% the Kei islands group, 20% the island of Tanimbar, and 20% the island of Morotai. The mediteranean soil covering 30% the Kei islands group, 25% the Tanimbar islands group, 90% the Kisar islands group, 30% the island of Halmahera, and 40% the Lease islands group.

Up till the present based on the avialable data the existing minerals among others are : crude oil at Bula (East Seram), mangan at the island of Doi (North Moluccas), nickel on the islands of Obi and Gebe (North Moluccas), sulphur at the Teon islands group, Nila, Serua and Pulau Manuk (Central Moluccas/Southeast Moluccas), quartz on the island of Taliabu, bauxite at East Seram, Obi, and Taliabu, astbes in East Gane and Weda, crude oil at Ekor, Bacan, Obi, Mangoli, Yamdena, and Aru. Ferrum at the islands group of Bobon.

The Moluccas Sea which is situated in the north-western side is connected with the Pacific Ocean through a wide gate between the island of Morotai and the island of Kaburuang (one of the Talaud islands group).

The connecting passage between the Moluccas Sea and the Pacific Ocean has a depth of 1.400 m transmitting into a more greater depth in the Pacific Ocean. The deepest point in the Moluccas Sea is situated approximately 20 miles south-west of Mandioli.

The connecting passage with the Seram Sea is situated between the island of Lifumatola and the island of Obi Major, with the deepest point about more than 14.000 m.

The Seram Sea which is situated in the northern side of Seram and Buru connected with the Halmahera Sea is passing a relatively shallow water, situated between the Tobalai Strait and the island of Batame (Misol). With the north-western part tne Banda Sea passing a passage situated between the southern point of the island of Sanama and the utmost point of northwest of Buru. (around the Bay of Bara). The most deepest of this passage is more than 3000 m transmitting into the Banda basin of the north western part, with the depth of more than 5000 m. While with the central part of Banda basin passing the Straits of Manipa and Kelang with the depth of more than 500 m. Through the fissures between the Gorom islands group, the mentioned sea is connected with the north-eastern partn of Banda. With the Arafura Sea through a passage situated between north of Nuhu Cut (the Kei islands group) and the strait of Adi (Irian Jaya) with the depth of more than 2.000 m. The deepest point of the Seram Sea, is more than 4.500 m, situated between the strait of Buano and the island of Obi Major.

The Halmahera Sea situated in the northern part of the Moluccas, is bordering the north-eastern beaches and the eastern beaches of Halmahera, and is directly connected with the Pacific Ocean. The mentioned sea can be classified into the "margin" sea. (although not in the literal meaning).

The Banda Sea can be divided into three main basins :

(a) The northwest basin of the Banda Sea. This basin is situated in the northwestern part of the Banda Sea, and is surrounded by the islands of Buru, Sula, Banggai, and the eastern coast of Southeast Sulawesi. The depth at the central part is mostly exceeding 5.000 m.

titik yang terdalam 7405 M. Laut Banda berhubungan dengan samudera Hindia melalui cela-cela gugusan pp. Sermata, Leti dan Laut Timor. Sedangkan dengan laut Arafura terutama melalui daerah yang terletak antara Pp. Kei dan Tanimbar. Sebagian besar dari Laut Arafura terletak di Paparan Sahul. Hubungan dengan samudera Hindia juga melalui laut Timor.

2. Iklim

Seperti halnya iklim di daerah tropis khatulistiwa yang dikelilingi perairan luas, maka iklim daerah Maluku sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung seirama dengan iklim musim yang terdapat di wilayah sekitarnya. Berhubung luasnya wilayah ini, terdapatlah gejala iklim setempat. Walaupun bukan merupakan penyimpangan yang berarti terhadap keadaan umum iklim di Maluku.

Maluku mengenal dua musim yaitu musim Barat atau Utara dan Tenggara atau Timur yang diselingi oleh dua musim "pancaroba" yang merupakan transisi antara kedua musim tersebut. Pada umumnya musim Barat atau Utara di Maluku berlangsung dari Desember dan berakhir pada bulan Maret, sedangkan musim Timur mulai pada Mei dan berakhir pada Oktober. Kedua musim ini diselingi oleh dua musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim Timur ke musim Barat yang pada umumnya jatuh pada April.

Suhu udara rata-rata sebesar 26,3°C dengan temperatur maksimum di atas 33°C yang jatuh pada musim kemarau dan minimum sebesar ± 15,1°C pada musim penghujan.

Panasnya udara di Maluku disebabkan besarnya penyinaran matahari rata-rata sebesar 67,5% dan besarnya tekanan rata-rata 1.011,9 melebar.

Curah hujan maksimum tahunan tercatat di Tehoru sebesar 4.090 mm dan minimum di Ilwahi sebesar 990 mm, dan kelembaban udara rata-rata tercatat sebesar 83,5%.

Keadaan musim pada daerah Tenggara Laut Banda lebih teratur dibandingkan dengan bagian lain-lain dari Nusantara, terutama di daerah perairan sekitar dan di dalam gugusan pulau-pulau Sermata dan Tanimbar.

Kekuatan angin pada umumnya lebih kuat dari pada daerah lain. Bulan April adalah awal musim Tenggara dan pada Mei musim ini sudah menjadi kuat dan teratur. Hal tersebut berlaku sampai dengan bulan Oktober dengan angin Timur menenggara, sedangkan dibagian Timur selat Wetar, meniup angin Timur Laut yang kuat. Musim Tenggara merupakan musim kering.

Musim Barat Laut pada Desember mencapai puncaknya pada Januari dan Pebruari dengan angin Barat Laut. Pada bulan Januari dan Pebruari yang merupakan musim hujan tercatat kekuatan angin yang terbesar. Di pulau-pulau yang agak tinggi terjadi hujan yang cukup deras. Musim pancaroba terjadi pada Maret dan April dan Nopember, kadang-kadang juga pada Oktober.

Di daerah Serwaru hujan maksimum jatuh pada April sedangkan musim panas (yakni musim Tenggara) mulai dari Juni hingga Oktober atau Nopember. Terutama disebabkan oleh badai tropika yang bergerak ke arah laut Timor dan Sawu. Anehnya pada daratan terjadi pergeseran musim kemarau pada setiap akhir tahun. Gelombang tinggi jarang terdapat kuat dan biasanya se arah dengan arah angin.

Sekitar dan sebelah Selatan deretan pulau Buru, Seram, Gorom dan Watubela, cuacanya agak berlainan dengan dibagian Tenggara Laut Banda dan musimnya agak berbeda sedikit dengan bagian Barat Laut Laut Banda. Misalnya kabutnya lebih tebal, penglihatan agak pendek, curah hujan yang besar namun hujan dengan angin kencang jarang terdapat. Musim Tenggara mula-mulanya di April dan mencapai puncaknya pada Juni, Juli dan Agustus. Mei sampai dengan Agustus adalah bulan-bulan dengan banyak hujan. Terutama di daerah Selatan pulau-pulau Buru dan Seram, disebabkan adanya punggung gunung dan bukit yang terbentang dari Timur ke Barat di pulau-pulau tersebut sehingga mempengaruhi jumlah curah hujan.

Jumlah curah hujan yang terbesar di daerah ini tercatat di pulau Ambon dan Saparua. Musim Tenggara keadaannya relatif lebih teratur dari pada musim Barat.

Musim Barat mulai pada Desember dan mencapai maksimumnya pada Januari dan Pebruari dengan angin Barat, Barat Laut yang acap kali berubah. Curah hujannya relatif kecil dari pada musim Tenggara, sehingga dapat dikatakan bahwa hujan sepanjang tahun.

Musim pancaroba terjadi pada April dan Oktober atau Nopember dan biasanya sangat pendek waktunya. Sedangkan Oktober dan Nopember adalah bulan-bulan kering.

Keadaan lautnya bergelombang sepanjang tahun dan minimal terdapat pada September, Oktober dan Nopember dan maksimumnya Musim Tenggara.

Di Barat Laut, Laut Banda dan Laut Maluku musimnya kuat dan

(b) The central basin of the Banda Sea. this belongs to the greatest part of the Banda Sea. Commensurating with its name its locality is between the Seram islands group, the Buru island in the northern part, the Banda islands group, Manuk, Nila, Serua, Teon and Damar, at the eastern part, and the Terbang islands group, Sermata, and Wetar in the southern part, while in the western part, bordering with the Flores Sea, the islands of Tukang Besi, Muna, and Buton.

At this central basin a part of its beds situated in the middle is in the possession of 4.000 m depth. The most deepest point is found in the southeastern part of the islands of Lucipara (about 5000 m).

The depth of the Weber Strait is a part of the Banda Sea which is situated between the Manuk islands group, Nila, Serua, Teon and Damar at the western side, and the Kei islands group and Tanimbar at the eastern side. Here we can find a depth exceeding more than 7.000 m., mainly situated between the island of Manuk and the Manggur islands group.

This region is the most deepest part of the sea in the whole Indonesian waters with the deepest point 7.405 m. The Banda Sea is connected with the Indian Ocean through the passages between the Sermata islands group, Leti and the Timor Sea. With the Arafura Sea mainlay through the region situated between the Kei islands group and Tanimbar. The most part of the Arafura Sea is situated in the Sahul Seabed. The conection with the Indian ocean is also through the Timor Sea.

2. Climate

As it is the case of the climate in the equatorial tropical zone surrounded by vast water area, the climate in the Moluccas is greatly affected by the seas and occurs inharmony with the monsoon climate found in the surroundng areas. With reference to the vast area in this region, there is a symptom of local climate, although it is not a significant deviation from the general climate efective in Moluccas.

The moluccas is in the possession of two kinds of seasons, namely the western or northern monsoon, and the southeastern or eastern monsoon, interrupted by two transition seasons. In general the western or northern monsoon in the Moluccas occurs from December and expires to the end of March, while the eastern monsoon begins in May and expires to the end of Oktober. These two monsoons are interrupted by two transition seasons, namely the transition from the eastern monsoon to the western monsoon, which occurs usually in the month of April.

The temperature has the average of 26,3° Celsius with the temperature of maximum above 33° Celsius occurring in the dry monsoon and minimum about 15,1° Celsius in the wet or rainy monsoon.

The heat of the air in the Moluccas in caused by the sun rays within the average of 67,5% and the quantity of pressure has the average of 1.011,9 horizontal.

The annual maximum rain debit recorded in Tehoru is 4090 mm and minimum in Ilwahi is 990 mm, and the air humidity has the avarage of 83,5%.

the seasonal condition in the southeastern area of the Banda Sea is more regular in comparison with the other parts of the Indonesian archipelago, especially in the surrounding waters and within the islands group of Sermata and Tanimbar.

The wind speed is stronger compraed to other regions in general. The month of April is the beginning of the southeastern monsoon and in May this monsoon is becoming strong and regularly. This fact expires to the month of October with the eastern wind blowing to the southeastern direction, while in the eastern side of the Wetar Strait the northeastern wind is blowing hard. The southeastern monsoon is a dry season.

The northwestern monsoon in the month of December reaches its climac in the month of January and February with the western and northwestern winds blowing. In the month of January and February which form the rainy season is recorded the strongest wind. In the islands of higher land level heavy rains occur. The transitional season occurs in the month of March or April and the month of November, sometimes also in the month of October.

In the area of Serwaru the maximum raindebit occurs in the month of April, while the dry season, namely the southeastern monsoon, beginning from June till October or November. In particular caused by the tropical storm moving to the Timor Sea and the Sawu Sea. It is strange enough that in the land area a shiftin of dry season occurs at the end of each calendar year. High waves are seldom found together with strong current and is usually having the same direction as the wind direction.

Around and in the southern side of the islands of Buru, Seram, Gorom, and Watupela, the weather is rather different compared to the southeastern part of the Banda Sea, and the monsoon is also a little bit different with the northwestern part of the Banda Sea For example, the mist there is more dense, the distance of sight is short, great debits of rainfall, nonetheless heavy

teratur. Sering terdapat kabut pada kedua musim, sedangkan hujan serta angin terdapat sepanjang tahun. Musim Selatan Daya (sama dengan musim Tenggara) dimulai dari Mei dan berakhir Oktober dengan keadaan yang relatif teratur. Kekuatan angin lebih dari Bf 5 jarang dijumpai. Biasanya akhir musim Selatan Daya ditandai dengan kabut. Musim Utara Barat Laut (sama dengan musim Barat) dimulai pada Desember dan berakhir pada Maret. Meskipun kekuatan angin relatif kurang kuat dari pada musim Selatan Daya, namun pada Oktober dapat terjadi angin ribut.

Bagian Selatan dari laut Maluku keadaan cuaca sama dengan bagian Barat Laut Banda. Hampir setahun penuh selalu ada hujan dengan curah hujan maksimum pada bulan-bulan Juli dan Januari, sedangkan minimum pada bulan-bulan Pebruari, September dan Oktober. Musim Utara (dapat disamakan dengan Barat) terutama dibagian Utara dan Timur Laut Laut Maluku keadaannya teratur dan agak kuat. Bulan Desember merupakan awal musim tersebut dan ditandai dengan kemungkinan terjadinya angin ribut untuk selanjutnya berakhir pada April.

Di kepulauan Sangir dan Talaud yang terletak dekat pada daerah badai tropika acapkali terjadi angin kencang berkekuatan 8 s/d 9 Bf. Biasanya terjadi pada bulan-bulan Nopember dan Maret. Musim Selatan dimulai Juni dan berakhir pada Nopember, dimana didominer terutama oleh angin-angin Selatan dan Selatan Daya. Angin-angin tersebut mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Musim pancaroba terjadi pada Mei yakni perobahan dari musim Utara ke Selatan, sedangkan bulan Nopember adalah peralihan antara musim Selatan ke Utara.

Arus lautnya yang disebabkan oleh angin biasanya tidak kuat dan arus musim Utara lebih kuat dari di musim Selatan dengan arah arus berturut Selatan, Selatan Daya dan Utara Timur Laut. Keadaan laut pada umumnya selalu bergerak dengan angin Utara, kemungkinan terjadinya gelombang-gelombang tinggi dan di musim Selatan terutama pada bulan Juli sampai dengan September dipermukaan laut sering terjadi gelombang-gelombang sedang sampai besar.

Laut Arafura mengalami musim tenggara mulai Maret atau April s/d Oktober dan puncaknya pada bulan-bulan Juni, Juli dan Agustus; lebih kuat dari musim Barat Laut. Di Kepulauan Kei sering terjadi bahwa musim tersebut lebih pendek dari pada di lautan sehingga musim pancaroba yang biasanya terjadi pada April agak terlambat datangnya sehingga peralihan musim Tenggara ke Barat Laut yang biasanya terjadi pada Nopember dipercepat.

Pada April angin Timur menenggara (ESE) dan Tenggara (SE) memegang peranan dan dominan, berhembus sampai Mei dengan perbesaran kekuatan untuk pada Juli dan Agustus dengan kekuatan yang maksimal sebesar 12 - 13 knot dan ketetapan (constancy) sebesar 80%. Angin ini berhembus terus sampai Juli dan Agustus dengan ketetapan 90%, namun kekuatannya mengurang. Pada September s/d Nopember angin musim ini menjadi lemah (ketetapan dari 80% turun menjadi 40%) berkecepatan rata-rata 8 - 9 knots.

Di daerah lautan musim Barat Laut mulai pada Desember s/d Pebruari dengan angin yang berhembus dari arah yang terletak diantara Barat Daya (WSW) dan Barat Laut (WNW) dan kecepatan yang cukup kuat hampir ⅔ musim lamanya. Biasanya angin kencang bila datangnya dari Barat Daya yang mengakibatkan laut bergelora yang disertai dengan hujan lebat dan guntur.

Keadaan musim di Laut Seram dan Halmahera kurang teratur, makin ke Utara bertambah berkabut. Hampir setiap bulan turun hujan. Sedangkan kekuatan angin terbesar, tercatat pada bulan-bulan Juli dan Januari. Musim Tenggara mulai pada Mei sampai dengan Oktober. Dari Mei s/d Juni arah anginnya belum teratur dan baru pada Juli, Agustus, September agak teratur namun hal tersebut masih dapat mengalami perobahan. Menjelang Oktober kekuatan serta ketetapan musim Tenggara mengurang dan pada Nopember angin Barat mulai memainkan peranannya. Musim Tenggara dikuasai oleh angin-angin Selatan dan bila dibandingkan dengan Barat merupakan musim kemarau.

Musim Barat mulai pada Desember s/d Maret dan merupakan bulan-bulan curah hujan yang besar. Musim ini didominir oleh angin Barat laut dan menghembus dari Desember s/d Maret. Angin tersebut tidak teratur. Sedangkan pada April terutama dikuasai oleh angin Barat Laut namun kekuatannya kecil sebagai tanda berakhirnya musim.

3. Penduduk dan Sumber Daya

Propinsi Maluku berdasarkan sensus penduduk 1971 mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.089.511 jiwa dan pada sensus 1980 keadaan tersebut menjadi 1.408.451 jiwa. Hal tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2,89% pertahunnya selama periode 1971 - 1980.

Dengan pertumbuhan tersebut, maka penduduk Maluku pada akhir Pelita IV tahun 1989 diperkirakan berjumlah 1.830.106 orang dan pada tahun 2000 diperkirakan bertambah menjadi 2.503.885. Kepadatan pen-

rain with strong winds is seldom to be found.

The southeastern monsoon in the beginning is moderate in the month of April and reaches its climax in the month of June, July, and August. The months of May and August are months of heavy rains. Especially in the southern parts of the islands of Buru and Seram, caused by the mountain range and hills stretching from east to west on the islands concerned so that they affect the rainfall debit.

The greatest rainfall debit in this region is recorded on the island of Ambon and Saparua. The southeastern monsoon's condition is relatively more regular in comparison with the western monsoon.

The western monsoon befins in the month of December and reaches its maximum in the month of January and February with the northwestern wind, and the western wind, which are often changeable. The rainfall is relatively little compraed to the southeastern monsoon, so that we can say that the rain is falling throughout the whole year.

The transitional season occurs in the month of April and the month of October or November and is usually of a short period. Meanwhile the months of October and November are the dry months. The sea condition is in the possession of waves throughout the year, and minimal to be found in the month of September, October and November, and its maximum is in the southeastern monsoon.

In the northwestern part of the Banda Sea and the Moluccas Sea the monsoon is strong and regular. There is often mist in both the seasons, while heavy rains and winds are found throughout the year. The southwestern monsoon (the same as the southeastern monsoon) is beginning in the month of May and is finished in the month of October with a relatively regular condition. The wind speed is more than Bf 5 and is seldom found. Usually the end of southwestern monsoon is marked by dense mist. The northwestern monsoon (the same as the west monsoon) begins in the month of December and finishes in the month of March. Although the wind speed is relatively not so strong in comparison to the southwestern monsoon, nevertheless in the month of December a storm cantake place.

The southern part of the Moluccas Sea has the same weathers as in the northwestern part of the Banda Sea. Nearly throughout the year there is always rain with a maximum rainfall debit in the months of July and January, while the minimum is in the month of February, March, September and October. The northern monsoon (it can be equalized with the western monsoon), especially in the northern part and northeastern part of the Moluccas Sea the condition of the weather is strong and regular. In the month of December is the beginning of the monsoon concerned and is marked by the possibility of a storm taking place forlowed further to the end of April.

On the islands of Sangir and Talaud, which are situated near the tropical storm zone, often occurs heavy winds with the power of 8 -- 9 Bf. Usually it happens in the month of November and March. The southern monsoon begins in June and ends in the month of November, where it is dominated by the southern and southwestern winds. Those winds have a strong enough power. The transitional season occurs in the month of May, namely the change from the northern monsoon to the southern monsoon, while the month of November is the transition between the southern monsoon towards the northern monsoon.

The sea current caused by the wind is usually not so strong and the current during the northern monsoon is stronger than during the southern monsoon with the direction of current towards the south, southwest, and the northeast. The sea condition is in general always moving with the northern wind, the possibility exists for the appearance of high waves and in the southern season especially in the month of July till the month of September on the surface of the sea great waves and mediocre waves are taking place.

The Arafura Sea undergoes the southeastern season beginning with March or April till October and its climax is in the month of June, July and August ; stronger than the northwestern monsoon. In the islands of Kei it often happens that this monsoon is shorter than in the sea water area, so that the transitional monsoon, which is usually occuring in the month of April, becomes sluggush and late, so that the transition from the southeastern monsoon to the southwestern monsoon, which is usually taking place in the month of November is quickened.

In the month of April the eastern south east (E.S.E.) and southeast (S.E.) winds are playing a significant and dominant role and are blowing till te month of May with the accelerating speed that reaches the maximal speed of 12 - 13 knots in July and August and a constancy of 80%. This wind is blowing continually till the month of July and August with the constancy of 90%, but its speed is declining.

In the month of September till November this kind of wind becomes weaker and weaker (the constancy from 80% declines into 40%) with the average speed of 8 - 9 knots.

In the sea water areas the northeastern monsoon begins in the month of December till the month of February with the wind blowing from the direc-

duduk rata-rata 17 orang per/Km². Kotamadya Ambon merupakan daerah tertinggi pertumbuhan penduduknya selama periode tersebut (11,24%) sedangkan Kabupaten Maluku Tengah mempunyai laju tingkat pertambahan terendah (0,80%). Lihat Tabel I-1.

Tabel / *Table I - 1*

PROYEKSI PENDUDUK MALUKU BERDASARKAN HASIL SENSUS PENDUDUK 1980 TAHUN 1980 — 1990
THE POPULATION PROJECTION IN THE MALUKU MOLUCCAS BASED ON THE 1980 CENSUS FOR THE YEAR 1980 — 1990

Asumsi : A / *Assumption A*

Tahun *Year*	Laki—Laki *Male*	Perempuan *Female*	Laki—Laki Perempuan *Male & Female*
(1)	(2)	(3)	(4)
1980	724.199	692.101	1.416.300
1981	744.843	710.697	1.455.540
1982	764.119	729.826	1.493.945
1983	784.909	749.431	1.534.340
1984	806.099	769.445	1.575.544
1985	827.645	789.788	1.617.433
1986	853.187	813.803	1.666.990
1987	879.637	838.807	1.718.464
1988	907.033	864.922	1.771.955
1989	937.981	892.125	1.771.955
1990	955.351	909.867	1.865.218

Sumber : *Proyeksi Penduduk Propinsi Maluku Tahun 1980 - 2000*
Source : The Population Projection in the Moluccas for the year 1980 — 2000

Sedangkan untuk tahun 1980 angka tersebut menjadi 51,08% penduduk laki-laki dan sisanya perempuan. Apabila digunakan asumsi bahwa usia produktif penduduk adalah antara 20—59 tahun, maka dapat dikatakan pada tahun 1971 terdapat 39,09% penduduk dalam usia produktif, yang meningkat menjadi 40,97% pada tahun 1980. Penduduk dalam kelompok ini menanggung beban kelompok penduduk pada usia diluar usia produktif.

Angkatan kerja pada tahun 1971 berjumlah 332.004 orang atau 45,53% dari seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas, terdiri dari angkatan kerja yang bekerja sebanyak 269.027 orang (81,03%); dan mencari pekerjaan sebanyak 83.971 orang (25.29%). Tahun 1980 jumlah angkatan kerja 403.884 orang atau 12,0% dari seluruh penduduk berumur 10 tahun keatas, yang terdiri dari 397.829 orang (98,51%) adalah bekerja dan 6.015 orang (1,49%) adalah mencari pekerjaan.

Jumlah angkatan kerja pada akhir Pelita IV di Maluku diperkirakan berjumlah 531.897 orang dan pada tahun 2000 diperkirakan akan bertambah menjadi 733.766 orang.

Dilihat dari struktur umurnya, maka sebagian besar angkatan kerja yang bekerja adalah pada kelompok usia 15—54 tahun. Keadaan ini sama untuk tahun 1971 maupun tahun 1980. Sedangkan untuk angkatan kerja yang mencari pekerjaan paling banyak pada kelompok umur 15—34 tahun.

Keadaan pada tahun 1980 menunjukkan, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja di Maluku mempunyai status pekerjaan sebagai tenaga kerja mandiri (29,59%), bekerja dengan bantuan buruh tak tetap (30,66%), sebagai pekerja keluarga tidak dibayar (20,02%) dan sisanya mempunyai status pekerjaan sebagai pekerja yang dengan bantuan buruh tetap dan buruh.

Dilihat dari jenis pekerjaannya dapat dikatakan, sebagai tenaga usaha pertanian (64,81%), tenaga-tenaga produksi (10,87%); tenaga lainnya (7,69%) dan sisanya mempunyai jenis pekerjaan sebagai tenaga profesional, tenaga kepemimpinan, tenaga tata usaha, tenaga usaha penjualan, tenaga usaha jasa. Pada tahun 1980 komposisi jenis pekerjaan mengalami perubahan yaitu: 58,90% sebagai tenaga usaha pertanian, 18.08% sebagai tenaga produksi, 9,31% sebagai tenaga usaha penjualan.

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja untuk Maluku pada periode 1971 - 1980 menunjukkan angka 3,36% per tahunnya dengan angka pertumbuhan tertinggi sebesar 39,98% untuk sektor bank, selanjutnya 34,55% untuk sektor pertambangan, 15,18% untuk sektor bangunan.

Daya serap kesempatan kerja pada periode 1971 - 1980 adalah 0,5623 untuk seluruh sektor dengan tingkat penyerapan tertinggi 7,0914 untuk sektor bank, dan 3,6106 untuk sektor pertambangan. Daya penyerapan kesempatan kerja terendah adalah pada sektor industri (0,2471).

Angka setengah pengangguran yaitu jumlah orang yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu menurut hasil sensus 1980 adalah sebesar 179.960 orang yang tersebar diberbagai sektor.

tion situated between western southwest (WSW) and western north west (WNW) with a rather strong speed nearly 2/3 period of the season. Usually the strong wind if coming from the southwestern side causing the sea bruising accompanied with heavy rain and thunderstorm.

The season condition in the Seram Sea and Halmahera is not so regular, the more to the north the more densely mists thera are. Nearly every month there is a rainfall. In the other hand the greatest wind speed, is recorded during the month of May till the month of October. From May to the month of June, the wind direction is not yet constant and beginning in July, August, September, it is becoming regular. Nevertheless such a condition is liable to any alteration. Towards the month of October the speed and the constancy of the southeastern monsoon decline and in the month of November the western wind begins playing its role. The southeastern monsoon is overwhelmed by the southern wind and compared to the western monsoon the season is dry season.

The western monsoon begins in December till the month of March and are becoming the months period of great rainfall debits. This season is dominated by the northwestern wind blowing from the month December till the month of March. The wind concerned is not regular. While in the month of April especially overwhelmed by the northwestern wind but its speed is rather small as the end of the season.

3. The Population and Resources

The province of Muluccas based on the population census 1971 is in the possession of population as many as 1.089.511 people and in the census of 1980 the situation concerned has become 1.408.451 people. The fact shows that there is a great growth rate of population as big as 2,89% per year during the period 1971 - 1980.

With such a growth rate, the population of the Moluccas at the end of Pelita IV 1988 is estimated covering a sum of 1.830.106 people and in the year 2000 it is estimated becoming the sum of 2.503.885 people. The population density has the average of 17 people per km2. The municipality of Ambon has the most high growth rate of population during the period mentioned above. (11,24%), while the central Moluccas regency district has the lowest growth rate of population (0,80%). See Table I-1.

While for the year 1980 the number mentioned above becomes 51,08% for the male population, and the rest is for the female population. If we use the assumption that the productive expectancy age of the population is between 20 - 59 year then we can say that in the year 1971 there is to be found 39,09% of population in the productive expectancy age, that is increasing into 40,9% in the year 1980. The population within this grouping is bearing the burden of the population group outside the productive expectancy age.

The labour force in the year 1971 hes the amount of 332.004 people or 45,53% of the whole population within the age of more than 10 years, consisting of the working labour force as many as 269.027 people (81,03%) ; and looking for jobs as many as 83.971 people or 12,0% of the whole population above 10 years of age, consisting of 397.829 people (98,51%) are workers and 6.015 people (1,49%) are looking for jobs.

The amount of labour force at the end of Pelita IV in the Moluccas is estimated as many as 531.897 people and in the year 2000 it is estimated to become 733.766 people.

From the point of view of the age structurs then the most part of the amount of working labour force is belonging to the age group of 15 - 54 years. This situation is the same as in the year 1971 or the year 1980. While for the labour force looking for jobs are mostly of the age group of 15 - 34 years.

The situation in the year 1980 shows, that the most part of the amount of labour force who are workin in the Moluccas heve the status of work as self-standing manpower (29,59%) working by non-permanent jobs (30,66%), as non-payment workers among the family (20,02%), and the rest has the status of work as permanent workers and skilled labours.

From the point of view of their types of work we can say that as workers in the agricultural enterprise (64,81%) the production manpower (10,87%); other manpower (7,69%) and the rest has the types of work as provessional workers, leadership workers, administrative workers, salesmen workers, service workers. In the year 1980 the composition of the type of work has undergone a change, namely : 58,90% as manpower in the agriculture enterprise, 18,08% as production manpower, 9,31% as salesmen workers.

On the whole the average of job opportunity growth for the province of Moluccas in the period 1971 - 1980 shows the number of 3,36% per year with the highest growth rate as much as 39,98% for the banking sector, further 34,55% for the mining sector, 15,18% for the construction sector.

The absorption of job opportunities in the period 1971 - 1980 is 0,5623 for the whole sector with the highest growth rate in the job opportunities absorption 7,0914 for the banking sector and 3,6106 for the mining sector.

Sedangkan tingkat pengangguran secara keseluruhan adalah sebesar 1,48%.

Tahun 1971 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Maluku menunjukkan laki-laki adalah 61,3%. Dan jumlah ini turun menjadi 45,3% pada tahun 1980. Sedangkan TPAK perempuan tahun 1971 adalah 29,2% dan turun menjadi 26,6% pada tahun 1980. TPAK secara keseluruhan juga menunjukkan penurunan pada periode 1971 - 1980, yaitu dari 45,3% tahun 1971 menjadi 42,2% tahun 1980. Melihat struktur umurnya, maka pada tahun 1971 TPAK tertinggi adalah pada kelompok umur 35—44 tahun (88,2%) dan juga untuk tahun 1980 kelompok umur tersebut menunjukkan TPAK yang tertinggi (64,7%).

Ratio penduduk berumur 15 tahun dan 65 tahun lebih terhadap penduduk berumur 15 tahun sampai dengan 64 tahun (disebut dengan dependency ratio) pada tahun 1971 menunjukkan angka untuk laki-laki sebesar 99,90% dan perempuan 90,46% (seluruhnya 96,17%). Pada tahun 1980 keadaan tersebut berubah menjadi 87,14% untuk laki-laki 85,03% untuk perempuan (seluruhnya 86,12%).

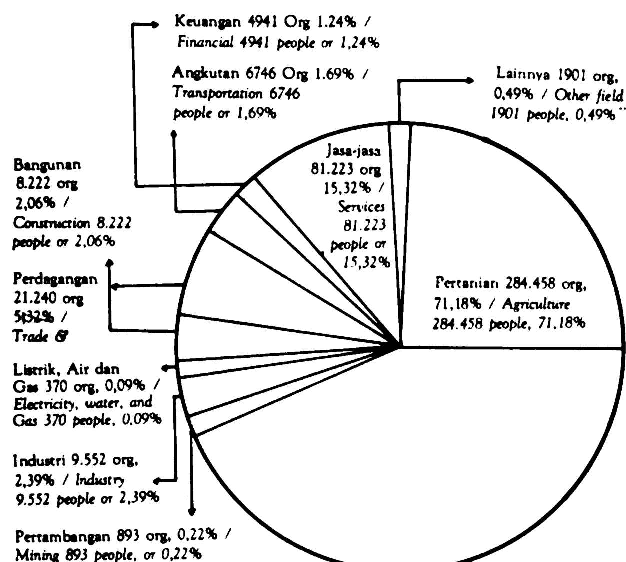
Pola kesempatan kerja di Maluku pada tahun 1971 menunjukkan bahwa lebih dari separoh penduduk yang bekerja (73,99%) berada pada sektor pertanian selanjutnya 9,82% bekerja pada sektor lain-lain, 8,87% pada sektor jasa dan sisanya tersebar pada sektor-sektor pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan, angkutan dan keuangan. Pada tahun 1980 pola tersebut mengalami perubahan menjadi 71,18% angkatan kerja yang bekerja ada di sektor pertanian, 15,32% pada sektor jasa, 5,31% pada sektor perdagangan dan sisanya tersebar pada sektor diluar sektor-sektor tersebut.

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Maluku tidak dapat dipisahkan dengan ciri perekonomian yang sangat ditentukan oleh keadaan geografis daerahnya maupun sumber daya alam yang terdapat di daerah itu. Mata pencaharian tidak dapat dipisahkan dengan tata kehidupan masyarakatnya.

Kegiatan ekonomi di Popinsi Maluku masih bersifat agraris. Hal ini tercermin pada banyaknya proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 79,77% pada tahun 1980. Selain itu dapat pula dilihat bahwa selama 10 tahun belakangan ini telah terjadi penurunan secara proporsional dari angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 3,59%. Sedangkan yang menonjol mengalami kenaikan adalah sektor jasa-jasa dimana besarnya kenaikan sebesar 5,7%.

Grafik / *Graphic I - 1*



Sebagai masyarakat agraris sebagian besar penduduk Maluku hidup sebagai nelayan. Sebab potensi perikanan terutama laut cukup besar di daerah ini.

Perairan Maluku mengandung berbagai sumber daya yang potensial dengan nilai ekonomis yang tinggi, baik sebagai sumber biotis, mineral maupun wisata bahari.

Tingkat kesuburan perikanan Maluku diperkirakan tiga kali tingkat kesuburan rata-rata Nasional untuk setiap Km² per tahun. Produksi

The absorption capacity of labour force at the lowest point is in the industrial sector (0,2471).

The amount of semi-unemployment is the amount of people working with the working hours lesser than 35 hours a week according to the census results 1980 is as much as 179.960 people who are scattered in various sectors. While the unemployment rate on the whole is as much as 1,48%.

In the year 1971 the labour force participation rate (TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) in the Moluccas shows the amount of male manpower as many as 61,3 %. This amount declines into 45,3% in the year 1980. While the labour force participation rate for females in the year 1971 is 29,2% and declines into 26,6% in the year 1980. The labour force participation rate on the whole also shows a decline in the period of 1971 -- 1980, namely from 45,3% in the year 1971 into 42,2% in the year 1980. Looking at the age structure, then in the year 1971 the labour force participation rate at the higest point is among the age group of 35 - 44 years (88,2%), and also for the year 1980 the age group concerned shows the labour force participation rate at the highest point (64,7%).

The ratio of the population within the age of 15 years and more than 65 years to the population within the age of 15 years till 64 years (called the dependency ratio) in the year 1971 shows the amount for the male manpower as many 99,90% and for the female labours 90.46 % (totally 96,17%). In the year 1980 the situation has changed becoming 87,14% for the male manpower and 85,03% for the females (totally 86,12%).

The employment opportunities pattern in the Moluccas in the year 1971 shows that more than half of the population working (73,99%) are in the agricultural sector and further 9,82% are working in other sectors, 8,87% in the service sector, and the rest scattered among the mining sector, industrial sector, electrical sector, construction sector, trade and commerce, transportation and financial sector. In the year 1980 this pattern has undergone an alteration becoming 71,18% working labour force is in the filed of agriculture, 15,32% in the service sector, 5,31% in the trade and commercial sector, and the rest scattered among the sectors outside those sectors mentioned above.

4. Living Means

The living means of the people in the Moluccas is not to be separated from the economic characteristics which is quite determined by the geographical areal situation and also of its natural resources found in that region. The living means is not to be separated from the way of living of the society itself.

The economic activities in the province of the Moluccas are still agricultural criented. This fact is reflected in the big proportion of the population working in the agricultural sector namely as much as 79,77% in the year 1980. Besides that we can also see that as long as the last recent 10 years there has been a decline taking place proportionally from the working labour force in the agricultural sector, namely as much as 3,59 %. While the most remarkable getting the highest growth rate is the service sector, where the amount of increase is 5,7%. See Graphic I-1.

As an agricultural society the most part of the populationin the Muluccas live as fishers, because the fishery potentiality, especially the sea is sufficient vital in this area.

The waters of the Moluccas contain various natural resources of significant potentialities with high economic value, either as the biotic resources or minerals or maritime tourism.

The fishery fertility rate in the waters of Moluccas is estimated three times the fertility of the national average for each km2 per year. The potential products is estimated able to reach 1,9 million ton fishes annually with the genuine potentiality as much as 1 million ton per year. The fishery source can be divided into two groups according to the types, namely the group based on real fishes, which is according to Bleeker and Wallace, the waters of Moluccas are containing about 780 types of fishes, and the group of non-fishes such as shrimps, pearls, sea weeds, lola, batulaga, sea cucumber.

The distribution of the types of ornament fishes is equitable all over the waters of the Moluccas with the most concetration found in the vicinity of the islands of Terselatan, Tanimbar, Kei kecil, the islands in the sub-district of East Seram and the Kayoa islands. The types of pelagis fishes are scattered equitable in the whole waters of Moluccas with some types which is economical of great significance concentrated in the Banda Sea, the sea around the island of Buru, the Seram Sea, the eastern side of the island of Halmahera, aground the island of Ternate, the Kayoa islands, the Bacan islands, the northern side of Yamdena island, and the eastern side of the island of Kei Besar.

Results of General Election

From the material point of view the socio-political development in the province of the Moluccas can be measured from the results of the general elections in the year 1971, 1982, and to the general election of 1987. One of the most remarkable aspect is the development in this region having the concrete results which is directly enhancing the society's dignity.

potensial diperkirakan dapat mencapai 1,9 juta ton ikan setiap tahun dengan potensi lestari sebesar 1 juta ton ikan setahun. Sesuai jenisnya, maka sumber perikanan tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jenis-jenis ikan (fishes) yang menurut Bleeker dan Wallace, perairan Maluku mengandung kira-kira 780 jenis, dan kelompok jenis-jenis bukan (non fishes) seperti udang, mutiara, rumput laut, lola, batulaga, teripang dan lain-lain.

Penyebaran jenis-jenis ikan hias merata diseluruh perairan Maluku dengan konsentrasi terbanyak terdapat di sekitar pulau-pulau Terselatan, Tanimbar, Kei Kecil, pulau-pulau di kecamatan Seram Timur dan pulau-pulau Kayoa. Jenis-jenis ikan pelagis tersebar merata diseluruh perairan Maluku dengan beberapa jenis yang ekonomis penting terkonsentrasi di laut Banda, laut sekitar Buru, laut Seram, sebelah Timur pulau Halmahera, sekitar pulau Ternate, pulau-pulau Kayoa, pulau-pulau Bacan, sebelah Utara pulau Yamdena dan sebelah Timur pulau Kei Besar.

Hasil Pemilu

Secara material perkembangan sosial politik di Propinsi Maluku dapat diukur dari hasil-hasil Pemilu Tahun 1971, 1982 dan sampai kepada saat-saat Pemilu tahun 1987. Yang jelas salah satu aspeknya yang menonjol adalah pembangunan di daerah ini mempunyai hasil konkret yang secara langsung telah mengangkat martabat masyarakat.

Usaha pencapaian kondisi dan situasi Politik yang seperti ini dimiliki Propinsi Maluku adalah merupakan hasil perjuangan dari usaha-usaha pemantapan stabilisasi sosial politik sejak tahun 1966.

Bagi masyarakat Maluku tahun 1966 s/d 1968 dinilai sebagai tahun-tahun perjuangan bagi kemantapan Orde Baru. Pada waktu itu perjuangan Pemerintah Orde Baru dari pusat sampai ke daerah ditujukan kepada usaha-usaha untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan pisik G30S/PKI.

Kerukunan hidup antar golongan Agama di daerah Maluku yaitu Islam sebagai suatu persekutuan historis dan turun temurun yang pada hakekatnya mengandung persetujuan antar 2 (dua) negeri/kampung atau lebih tanpa membedakan agama atau kepercayaan masing-masing pihak dalam mengatur soal-soal kerjasama yang sama sekali tidak boleh merugikan pihak-pihak yang bersangkutan, sampai sekarang masih terus dibina. Dengan demikian jiwa dan semangat toleransi antar golongan agama tertentu tetap terpupuk dan berkembang sehingga merupakan landasan yang kokoh bagi usaha-usaha pemantapan keadaan sosial politik di Maluku.

Segi perkembangannya organisasi sosial politik yang ada di daerah merupakan infra struktur politik dalam perkembangan organisasi-organisasi, terutama di daerah Maluku yang menunjukkan adanya suatu tingkatan perkembangan.

Dari pelaksanaan Pemilu tahun 1971 dengan penduduk berjumlah 1.028.409 orang serta pemilih sebanyak 535.632.

Organisasi peserta pemilu 10 buah. Sedangkan hasil-hasilnya tercatat sebagai berikut; Partai Katolik Indonesia mendapat 16.367 suara, PSII 15.415 suara, NU 33.653 suara, Parmusia 75.893 suara, Golkar 243.492 suara, Partindo 98.379 suara, Murba 2.004 suara, PNI 21.614 suara, Partai Islam Perti 2.321 suara dan IPKI 1.507 suara. Jadi jumlah suara yang sah masuk berjumlah 510.645 suara (93,34%). Sedangkan jumlah suara yang tidak sah sebanyak 24.987 suara, termasuk yang tidak dapat memberikan suaranya karena sesuatu dan lain hal.

Golkar pada waktu itu memperoleh suara sebanyak 47,68% sedangkan target yang hendak dicapai hanya 35%.

Pada Pemilu 1977 tercatat jumlah penduduk di daerah pemilih ada 664.043 orang. Organisasi peserta pemilu sudah menjadi 3 buah karena adanya fusi partai. Dari pemilu tersebut tercatat PPP mendapat 116.090 suara, Golkar 436.983 suara dan PDI 56.039 suara. Jumlah suara yang sah tercatat 609.112 suara atau rakyat Maluku yang menggunakan hak suaranya meningkat menjadi 94,72%. Pemilu tahun 1982 jumlah penduduk yang di daerah ini sudah menjadi 1.410.664 orang. Jumlah pemilih disini sebanyak 749.839 orang. Hasil Pemilu 1982 tercatat PPP mendapat 136.766 suara, Golkar 533.099 suara, PDI 41.202 suara. Jumlah suara yang sah masuk 711.067 suara.

5. Kebudayaan dan Adat Istiadat

Propinsi maluku secara geografis terbagi dalam tiga bagian yaitu: Maluku Utara, Tengah dan Tenggara. Dilihat dari potensi kebudayaan daerah ini termasuk adat istiadatnya tidaklah kalah dengan propinsi-propinsi lainnya. Potensi kebudayaan dan adat istiadat Maluku sangat banyak yang dapat dikembangkan menjadi kebudayaan nasional. Seperti yang sudah lama dikenal dalam sistem kemasyarakatan di Maluku yang dikenal dengan "PELA" merupakan sistem kemasyarakatan yang sampai sekarang masih kuat dipertahankan dalam upaya mencari jalan

The attempts to attain such a condition and situation on political field in the province of Moluccas are the results of the struggle of the stabilizing efforts on socio-political atmosphere since 1966. For the people of the Moluccas the year 1966 to 1968 is valued as the years of struggle for the consolidation of the New Order. At that time the strife of the New Order from the central government to the regional government is aimed to efforts to demolish the physical remnants of G-30S-PKI (the 30th September abortive coup of the Indonesian Communist Party).

The peaceful coexistence among the inter-religious groups in the province of the Moluccas, namely the Moslem religion as the historical fellowship inherited from one generation to the other, which is in reality containing agreement between two villages or more without making distinction of religions of each party in arranging matters on cooperation which should not cause any harm to the parties concerned, up till now is still fostered. Thus in doing so the spirit and the sense of tolerance among the certain religious groups are maintained and developed so that it becomes a strong foundation for the attempts of stabilization of sociopolitical situation in the Moluccas.

The aspect of the development of the socio-political organization existing in the province has become the political infrastructure in the development of organizations, especially in the region of the Moluccas, that shows a certain level of development.

From the realization of the general election in the year 1971 with the population amount of 1.028,409 people and the voters of 535.632 people.

The organizations taking part in the general election is 10 parties. The results are recorded as follows :
The Indonesia Catholic party gets 16.367 electoral votes ; the PSII (the Moslem Union Party Indonesia), 15.415 votes ; the NU (the Moslem Scholars Party) 33.653 votes ; Parmusi (the Indonesian Moslem Party) 75.893 votes ; the Golkar (Functional Group) 243.492 votes ; Parkindo (the Christian Party) 98.379 votes ; Murba (the people's party) 2.004 votes ; PNI (The Indonesian National Party) 21.614 votes ; Perti (the Moslem Mystical Party) 2321 votes; and IPKI (the Indonesian Independence Pioneering Party) 1.507 votes. So, the legal votes attained 510.645 votes (93.34%), while the illegal votes are as many as 24.987 votes, including those voters not able to turn in their ballots due to one and other reasons.

The Golkar (Functional Group) at that time gets the votes as many as 47,68% while the target being aimed is only 35 %.

In the general election of 1977 the amount of population is in the electoral regions are 664.043 orang. The participating organizations in the general election has become only three parties due to the fusion of parties. From the general election concerned it is noted that the results are as follows: P3 (PPP = Partai Persatuan Pembangunan) or the Moslem Oriented Development Party gets 116.090 votes, the Golkar (the Functional Group) 436.983 votes, and PDI (Partai Demokrasi Indonesia) or the Indonesian Democratic Party gets 56.039 votes. The total legal votes are noted 609.112 votes or the population of the province in the Moluccas using their voting right is increasing to 94,72%. The general election in the year 1982 the amount of population in this region has become 1.410.664 people. The number of voters here are as many as 749.839 people. The results of the general election of the year 1982 is noted as follows : PPP gets 136. 766 votes ; Golkar 533.099 votes : PDI 41.202 voters. The amount of legal ballots turned in are 711.067 votes.

5. Culture and Traditional Customs

The province of Moluccas from the point of geographical view is divided into three parts, namely North Moluccas, Central Moluccas, Southeast Moluccas. If we look at the cultural potentiality of this province including its traditional customs is not inferior to the other provinces. The cultural potentiallity and the traditional customs in the Moluccas are many of them able to be developed in sustaining the national culture.

As it is already known for a long time in the social system in the Moluccas, wellknown as the "pela", is a social system strongly maintained in the efforts to look for a way out from several problems among the society members which is up till now.
A decision that should be taken by way of negotiation without discrimating of religions, tribes, language etc. is done through the "pela" institution. By acknowledging "Pela" we are aware that the traditional society of the Moluccas is a democratic society.

The organizations existing in the rural areas also have their typical characteristics which up to the present are still in effect, not with standing the Law no 5 the year 1979 on the rural public administration declared in force and effect. In some areas in the Moluccas someone who is holding the position as a village head is the man who has been appointed as "raja" (leader) which function is of a hereditary characteristic, is acknowledged by the local community.

At the moment a "raja" (the village head) is chosen by the community members. The process of election is carried out by collecting the opinion input

keluar dari berbagai permasalahan diantara anggota masyarakat. Suatu keputusan yang harus ditempuh dengan jalan musyawarah tanpa memperhitungkan perbedaan agama, suku, bahasa dan sebagainya dilakukan melalui lembaga "PELA" kita tahu bahwa masyarakat tradisional Maluku telah masyarakat demokratis.

Organisasi-organisasi yang ada di pedesaan juga mempunyai corak tersendiri yang sampai sekarang masih berlaku sekalipun Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah diberlakukan. Dibeberapa daerah di Maluku seorang yang menjadi Kepala Desa adalah seseorang yang telah menjadi raja yang secara turun temurun sudah diakui masyarakat setempat.

Dewasa ini seorang "Raja" (Kepala Desa) dipilih oleh rakyat. Proses pemilihan ditempuh dengan memperoleh pendapat dari sebagian besar masyarakat.

Jabatan lain yang dimiliki dalam tingkat pedesaan adalah ahli adat (Kepala Adat) yang dianggap menguasai sebuah desa (Aman) dan Kepala bagian desa (Kepala Soa). Disamping itu ada pula ahli adat mengenai hukum adat tanah dan soal-soal warisan tanah (tuan tanah), seorang pejabat adat yang dulu merupakan panglima perang (KAPITAN), polisi kehutanan (Kewang) dan penyiar berita di desa (Marinyo). Semua pejabat Pemerintahan desa tergantung pada Dewan Desa, atau istilah yang lazim disebut "Saniri".

Kenyataan yang masih berlaku dibeberapa di daerah Maluku bahwa belum semuanya raja ditempuh dengan pemilihan. Faktor keturunan juga masih ada yang memberlakukannya. Karena klen secara adat masih berhak untuk memegang pimpinan. Demikian pula jabatan raja masih merupakan jabatan adat saja, sedangkan Pemerintahan desa yang sungguh-sungguh dijalankan oleh Kepala-kepala Soa. Jabatan Kepala Soa ini dilakukan secara bergiliran yang lamanya disepakati. Seperti dua bulan atau empat bulan. Kepala-kepala Soa yang sedang melaksanakan tugasnya disebut "Kepala Soa Jaga" atau disebut "Bapak Jou". Kemudian nama saniri juga sudah biasa dipergunakan untuk sebutan nama bagi Dewan-dewan Pemerintahan di desa yang lebih luas sifatnya. Sehingga kalau ditelusuri ada 3 macam Dewan Saniri yaitu; Saniri Rajapatih yang terdiri dari raja dengan Kepala-kepala Soa, yang tugasnya merupakan pelaksana-pelaksana administrasi desa dan meneruskan instruksi-instruksi yang datang dari Pusat. Ada lagi Saniri Negeri Lengkap yang terdiri dari Raja, Kepala-kepala Soa, ditambah dengan pejabat-pejabat lainnya yang merupakan dewan pembuat aturan-aturan adat atau dengan legislatif dan akhirnya ada yang disebut Saniri Negeri Besar, yang terdiri dari semua pejabat-pejabat Pemerintahan desa, ditambah dengan semua laki-laki warga desa yang sudah dewasa. Dewan ini adalah merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Kecil, tetapi dalam praktek sehari-hari Dewan ini jarang sekali berkumpul kecuali hanya disaat-saat pemilihan Raja, dalam upacara pengesahan Raja baru dan sebagainya.

Suatu ciri yang menonjol di masyarakat pedesaan Maluku adalah masih banyaknya organisasi-organisasi adat dengan tujuan dan fungsi sosial yang tertentu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terdapat sangat menyolok di desa-desa di Ambon dan Seram. Organisasi-organisasi seperti ini telah tumbuh dengan suburnya. Salah satu contoh adalah organisasi PATASIWA dan PATALIMA. Organisai ini adalah merupakan organisasi untuk menghimpun kekuatan politik dan dulu adalah merupakan organisasi kemiliteran. Istilah Patasiwa berarti sembilan bagian dan Patalima berarti lima bagian. Di Ambon dan Seram tiap-tiap desa termasuk dalam salah satu dari kedua organisasi tersebut.

Organisasi yang penting diketahui, terutama yang terdapat dalam masyarakat pedesaan di Ambon adalah organisasi Pela. Pela adalah merupakan persatuan dan persahabatan diantara warga-warga dari dua desa atau lebih yang berdasarkan adat. Organisasi yang serupa ini mempunyai kewajiban satu dengan yang lainnya, tetapi juga bisa mengharapkan bantuan spontan dari semua anggota organisasi dalam keadaan bahaya atau kesusahan. Pela ini terdapat dua macam yaitu ada Pela keras (pela tulen atau pela minum darat dan ada pela tempat sirih). Mengenai Pela keras ini anggota-anggota saling membantu dalam hal peperangan atau kalau ada bahaya serangan dari pihak musuh. Perkawinan diantara anggota Pela keras sama sekali tidak diperkenankan (dilarang keras). Sedangkan anggota-anggota dari Pela tempat sirih, wajib saling bantu membantu dan bergotong royong dalam hal berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti: membangun Balai Desa, Gereja, Mesjid dan bangunan sekolah-sekolah. Mereka wajib memberikan sagu kepada anggota se Pela yang sedang memerlukannya; mereka wajib menerima anggota se Pela yang mau menginap dirumahnya. Beda dengan Pela keras, larangan kawin dengan Pela tempat sirih tidak keras.

Mengenai keanggotaan Pela sama sekali tidak dibatasi oleh Agama. Oleh karena itulah di Pedesaan tidak asing lagi pela desa Nasrani dengan Pela desa Islam bergabung dalam satu pela. Oleh karena itulah Pela

from the most part of the soicety.

The other position to be held in the rural level is the "ahli adat" or the village chief who is an expert in the traditional law and customs (traditional chief) who is considered to be able to lead a rural area (aman), and the sub-vil-lage chief (kepala soa). Besides that there is also an expert on the traditional law concerning land and in relationship with the land inheritance (landlords), a traditional official who was formerly acting as commander in chief (kapitan), the forest police officer (kewang), and the village herald (marinyo). All the authoritative officials in the village are depending on the village council, or popular known as the "santri".

The reality effective in some areas in the Moluccas is that not yet all rajas are being elected by the people. The hereditary factor is still valid among them, because the clans from the traditional point of view is considered still having the leading role in the community. The same case is it with the position of "raja" is still considered as a traditional job, while the real rural authority is executed by the "soa" leaders. the position of this soa leader is done by turn of which the expiration should be collectively agreed upon., for example for the period of two months or four months. The soa leaders who are in charge of the administration are called "kepala soa jaga" (the picket village leader) or also called "bapak jou". Then the name "saniri" is also common used for the name of the village councils with a more broad function. if we investigate on it there are three kinds of saniri council, namely : saniri rajapatih consisting of the raja and the soa leaders, whose function is to carry out the village administration and passing through the instruction coming from the central government. There is also the "saniri negeri lengkap" (the complete village council) consisting of the raja, the soa leaders plus other officials in charge of composing the traditional law or the legislative council, and at last we can find what is called "saniri negeri besar" (the anlarge village council) consisting of all village authoritative officials, plus all the male adults in the community. This council is considered to be the mini legislative council, but in the daily practice this council is seldom holding a meeting, except in the time facing the election of the raja, in the attempts to inaugurate a new raja, etc.

A special remarkable characteristic among the rural society in the Moluccas is the existence of so many traditional organizations with the social aim and funcion for certain purposes in the social life. This phenomenon is in particular blatant in the villages of Ambon and Seram. The organizations such as these heve been growing abundantly. One of the examples is the organization of "patasiwa" and "patalima". These organizations are organizations destined to collect political forces which formerly was an organization of military hallmark. The term "patasiwa" means nine parts and "pataima" means five parts. In Ambon and Seram every village is belonging to one of the two organizations mentioned above.

The organization most wellknown especially among the members of the village society in Ambon is the "pela" organization. "Pela" is the form of unity and fellowship among the citizens of two or more villages based on the traditional customs. Organizations such as these have a duty of one another, but also able to expect spontaneous aids from all the organization members in case of emergency or difficulties. This "pela" system is comprising two kinds of characteristics, namely "pela keras" (or "pela tulen" or "pela minum darat") or the genuine pela, and there is also the "pela keras" their members are mutually helping each other in case of war or if there is a danger of attack from the enemy. Marriage among the members of "pela keras" is entirely prohibited (strictly forbidden). In the other hand the members of "pela tempat sirih" are obliged to help each other and practice mutual assistance in many aspects of social activities such as : to build up the village meeting hall, churches, mosques, or school buildings. They are obliged to give sago palm flour to the members in need of food whitin the same pela ; they are obliged to accept the members of the same pela to lodge at their homes. Unlike the "pela keras" the prohibition of marriage in the "pela tempat sirih" is not so strict.

Concerning the membership of the "pela" is not restricted to any religion at all. Therefore in the rural areas the Christian vllages "pela" are joining together with the Moslem villages "pela" in one single "pela". That's why the "pela tempat sirih" is a social organization which is not committed to any religious influence. A form of organization in the society which is also in the possession of all the villages in the Moluccas is called "muhabet". This organization is of the duty to administer all necessities in connection with the death cases of the society members. The member of this organization is consisting of the relatives and inhabitants of the same village.

Further in the rural society in the Moluccas the "mata rumah" of the natives has a higher social standing than the "mata rumah" of the non-natives. In the reality they consider it to be held in high esteem the "mata rumah" originating from the old village order (negeri lama). Doing so it is obvious that there is a clear stratification in the society based in the genuine characteristics of the natives. Besides that due to the political power factor which is inherited from generation to generation, then the clans having the

tempat sirih ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang tidak terikat kepada pengaruh agama. Suatu bentuk organisasi masyarakat yang juga dimiliki oleh semua desa di Maluku yang disebut Muhabet. Organisasi ini bertugas untuk mengurusi segala keperluan yang ada hubungannya dengan kematian anggota masyarakat. Anggota dari organisasi ini terdiri dari para kerabat dan warga satu desa.

Kemudian dalam masyarakat desa di Maluku "MATARUMAH" dari penduduk asli mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada "matarumah" pendatang. Pada hakekatnya mereka memandang lebih tinggi "matarumah" yang merupakan keturunan langsung dari negeri lama. Dengan demikian dalam masyarakat desa terlihat adanya stratifikasi sosial yang dasarnya adalah sifat keaslian dari penduduk desa. Disamping itu karena faktor kekuasaan politik diwariskan secara turun temurun, maka klen-klen yang mempunyai tanggungjawab itu menjadi orang ini sudah memeluk agama Nasrani dan sekaligus mendapat perhatian yang baik dari Belanda. Namun dikalangan masyarakat sendiri anggota masyarakat tersebut disebut Belanda Hitam.

Disamping adanya pimpinan desa dan Kepala-kepala adat yang sudah diakui orang Ambon juga mengenal pimpinan-pimpinan agama, yaitu Agama Nasrani, Islam dan agama asli. Seperti dimasyarakat yang memeluk agama Nasrani, Pendeta dan Pemuka lainnya diangkat oleh Sinode Gereja Maluku yang menduduki tempat tertinggi pada Umat Kristen dalam satu desa. Demikian halnya Islam, Haji merupakan pemuka agama Islam yang cukup dihormati. Pemimpin agama-agama lain, yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Saniri Negeri adalah Imam, Kotib, Modin dan Saras (Marinyo agama yaitu pembawa berita). Disamping pemimpin adat dan agama masih ada pemimpin-pemimpin politik dan pendidikan. Pemimpin yang seperti ini sedang berkembang dengan cepat di daerah Maluku umumnya dan di Ambon khususnya yang senantiasa disesuaikan dengan kemajuan masyarakat.

Berbicara tentang kehidupan sehari-hari di Maluku yang berkaitan dengan mata pencaharian mereka umumnya mereka bertani di ladang. Mereka membuka ladang dengan cara sederhana dan mengadakan kegiatan pertanian itu dengan sederhana pula. Dengan membakar hutan setelah pohon-pohon dikeringkan kemudian ditanami dengan pengolahan tanah yang sedikit, ladang tersebut ditanami berupa kacang-kacangan dan ubi-ubian.

Walaupun beras sudah biasa mereka makan sekarang, namun makanan sagu masih sangat dominan ditanam. Sebab pohon sagu tumbuh di rawa-rawa tanpa ditanam. Cara memproses sagu ini juga sangat sederhana, setelah pohon sagu ditebang maka serat yang ada ditengah batang diperhalus sehingga antara tepung dan serat dapat terpisah. Kemudian dicuci dengan air dan diperas melalui saringan dari kain, dan tepungnya ditadah. Tepung ini dicetak sesuai dengan selera tetapi kebanyakan membuatnya dalam blok-blok empat segi dengan daun sagu dan dinamakan tuman. Cara orang Ambon makan sagu dengan membakar tuman atau memasaknya menjadi bubur kental (Pepeda).

Kehidupan orang Maluku juga tidak dapat dipisahkan dengan laut. Laut juga merupakan sebagian kehidupan mereka. Sumber protein juga kebanyakan bersumber dari laut seperti ikan. Dan boleh dikatakan sampai saat ini ikan masih sangat dominan sebagai sumber protein hewani di seluruh Maluku. Oleh karena itulah penduduk Maluku atau orang Ambon tidak dapat melepaskan kehidupan dengan kebiasaan laut. Laut di Maluku yang terkenal ganas dan angin yang kencang, telah membuat warna pada sifat-sifat orang Maluku yang keras dan terbiasa menghadapi tantangan. Namun dibalik keganasan laut atau alamnya, bagi orang Maluku, laut dan angin merupakan puiaan yang sering dilukiskan dalam gerak dan lagu yang merupakan sebagian dari bentuk kesenian Maluku.

Masyarakat tradisional Maluku umumnya juga percaya kepada roh-roh. Untuk masuk "baileu" orang harus melakukan upacara lebih dahulu. Yang melakukan upacara minta izin masuk baileu ialah tuan negeri (mauweng) yaitu perantara manusia dengan roh-roh nenek moyang.

Orang Ambon umumnya mengenal pula upacara "inci negeri" yang mungkin dapat disamakan dengan upacara bersih desa di Jawa. Pada saat itu semua orang wajib membersihkan segala sesuatu dengan baik seperti bangunan baileu, rumah-rumah, dan pekarangan. Setelah upacara bersih desa yang disertai pidato Kepala Adat (Pasawari) diadakan pesta sukaria.

Orang Maluku Tengah umumnya juga mengenal upacara pembayaran "kain berkat" yang dilakukan klen pengantin lelaki kepada Kepala Adat dari desa pengantin perempuan. Pembayaran itu berupa kain putih dan tuak.

Di desa-desa Ambon yang beragama Islam seperti disebut oleh Subyakto dari Universitas Indonesia ("Manusia dan Kebudayaan di Indonesia") terlihat pula adanya dua golongan penganut yang mungkin dapat disamakan dengan Islam bangan dan Santri seperti di Jawa.

responsibility, after embracing the Christian religion they got a good favour from the Dutch government. Nevertheless within the domain of the native society the members of the soicety concerned is called "the black Dutch".

Besides the existence of the village chief and the traditional customs chiefs being acknowledged, the Ambonese people also recognize the religious leaders, namely the Christian religion, the Moslem religion, and the native beliefs. Like in the society embracing the Christian religion, the pastor and other religious prominent leaders are appointed by the Synof of Moluccas Church holding the highest position among the Christian inhabitants of a village. The same case is it with the Islam, Haji is the prominent leader of the Moslems who is fully respected. The leaders of the other religions, who are appointed by the village chief and legalized by the "saniry negeri" are the Imam, Khotib, Modin, and Saras (the religious propagator). Besides the traditional customary and religious leaders there are still other leaders, namely the political and educational leaders. Such leaders like these are developing steadily in the Moluccas in general and in the Ambon area in particular, which is always adjusted to the improvement of the society.

Speaking about the daily life in the Moluccas in relationship with their living means, in common they are farmers working in the dry fileds. They cultivate dry fields with a simple system and perform activities of simple characteristics too. By burning the forest, after the trees have been dried up, then they planted crops with a small area of land they plant the dry field with the bean families and cassave and sweet potatoes.

Although they are accustomed to eat rice now, they still consider the sago flour food dominant too. The sago palms are growing in the swamp areas without being planted (growing wildly in the morass). They simply take the products after considered being mature. The way of sago processing is also very simple, after the sago tree having been cut down, then the fibers within the trunk is pounded, so that the flour can be separated from the fibers. Then it is washed with water, pressed with a safe made of cloth, then the flour is pooled in. This flour is printed according to the taste, but most of it are printed in square forms with the sago palm leaves covering it, that is called "tuman". The way the Ambonese eat sago is by baking the "tuman" or rock it into thick porridge (pepeda)

The way of life of the Moluccas is not to be seperated from the sea. The sea is also a part of their life. The protein sources is mostly found in the sea such as fishes. It can be said up till now the fish is still being the most important protein source in the whole of the Moluccas. Therefore the inhabitants of the Moluccas or the Ambonese cannot leave out the way of living with the sea tradition. The sea in the Moluccas which is known as ferocious with hard wind, imprint the characteristics of the people of Moluccas having hard temperament and is accustomed to face challenges. Nonetheless behind the ferocity of the sea and its nature, for the people of Moluccas the sea and the wind are elements they adore, which they always reflect in movements and songs, which have become a part of the art of the people of the Moluccas.

The traditional society in the Moluccas in general also believe in the spirits. In order to enter the "baileu" man has to hold ceremonies first. The man in charge of asking permission to enter the "baileu" is the village - lord (mauweng) that is the mediator between human being and the ancestors spirits.

The Ambonese in general also know the ceremony of "inci negeri" which is slightly comparable to the ceremony of "bersih desa" (to clean the village) in Java. At that time all the people are obliged to clean all and everything quite well, such as the "baileu" construction, houses, and gardens. After the village cleaning ceremony accompanied by the speech of the village chief (pasawari) they conduct an enjoyable feast.

The people from the Central Moluccas in general also know the ceremony of payig the "kain berkat" which is done by the bridegroom clan to the traditional customary village chief of the bride. The payment consists of white cloth and palmwine.

In the Ambonese villages of which the inhabitants are embracing the Moslem religion, as mentioned by Subyakto of the University of Indonesia in the book entitled "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" (Man and Culture in Indonesia), we can also see the existence of two tendencies that can be compared to the "Islam Abangan" and "Santri" in Java (superficial Moslems and pious Moslems).

In the city of Kailolo and Haruku island the inhabitants belong to the pious group. The fasting month is begun and finished officially. There is also the "Lebaran Haji" after the village chief knows the appropriate date from the "imam" (Moslem priest) then the members of "saniri" would determine the day of "Idul Korban" feast (the day of offering). On this offering day the goats purchased collectively are brought to the priest's house. From here the goats are brought further to the house of the village chief, then to the mosque, to be slaughtered by the priest.

In other villages of the same Moslem religion, the heads of the slaughtered goats, are usually brought to the building of the "baileu", put on the stone

Di Kailolo kotanya seperti di pulau Haruku penduduknya ialah Santri. Bulan Puasa dimulai dan diakhiri dengan resmi. Ada juga lebaran Haji setelah Kepala Negeri mengetahui harinya dari imam maka anggota "santri" menetapkan hari Idul Korban. Pada hari korban, kambing yang dibeli bersama-sama itu dibawa ke rumah imam. Dari sini dibawa ke rumah Kepala Negeri lalu ke mesjid untuk dipotong oleh imam.

Di berbagai negeri yang beragama Islam lainnya, kepala kambing korban biasanya ke rumah baileu, diletakkan di atas batu dekat kepala-kepala korban dari tahun-tahun yang lalu.

Menurut Subyakto supaya korban kambing itu dapat dihubungkan dengan kurban manusia pada waktu dahulu kala. Hal ini juga terjadi di desa yang beragama Kristen seperti orang Hutawan di Saparua dan Tuhaha.

6. Pemerintahan

a. Latar belakang

Daerah Maluku pada jaman penjajahan Belanda dalam struktur Pemerintahan tercakup dalam dua jenis bentuk organisasi administratif, yang diberi nama "Rechtsreeksbestuurde gebieden" dan "Zelfbestuurde gebieden". Yang disebut pertama terdiri dari daerah-daerah yang sekarang dikenal dengan nama "Daerah Maluku Tengah" dan "Daerah Maluku Tenggara" serta "Kotamadya Ambon" (Gemeente Ambon). Ketiga daerah tersebut waktu itu tercakup dalam "Residentie der Zuid-Molukken". Sedang sebutan yang kedua, kini bernama "Daerah Maluku Utara" dan "Daerah Administratif Halmahera Tengah" yang **waktu itu bernama "Residentie der Noord-Molukken".**

Dalam lingkungan "Residentie der Zuid-Molukken" policy Pemerintahan disesuaikan dengan struktur organisasi yang sudah ada dalam bentuk yang oleh rakyat diberi nama "Negeri" (istilah teknis sekarang **adalah Desa). Bentuk itu mereka kualifikasikan dalam istilah "Territoriaal Genealogische Rechtsgemeenschappen" yang dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai "Persekutuan Hukum Teritorial Genealogis".**

Adapun "Negeri" dalam substansi bentuk dan eksistensinya sejak semula sudah memiliki Tata Pemerintahan sendiri yang disusun dan **diatur oleh rakyat Negeri yang bersangkutan antara lain yang unik sekali ialah bahwa dalam negeri itu pemerintahan dijalankan oleh dua badan yang berstatus Legislatif dan Eksekutif. Kepala Pemerintahan diberi gelar "Raja" dan diangkat oleh rakyat melalui sistem pemilihan. Dalam prakteknya pada fungsi "Raja" terjalin dua tugas pokok yaitu:**

- **Raja sebagai Kepala Pemerintahan (Bestuurshoofd) dari Negeri yang bersangkutan.**
- **Raja sebagai Kepala Adat (Adathoofd) dari persekutuan hukum adat yang bersangkutan.**

Badan Legislatif Negeri dikenal dengan nama "Saniri Negeri". Disini duduk wakil dari golongan-golongan dalam Negeri itu sedang Badan Eksekutif terdiri dari Raja bersama-sama dengan "Saniri Patih" yang merupakan badan pemerintahan harian. Pada umumnya Negeri itu terdiri dari beberapa "Soa" yaitu jenis kelompok persekutuan genealogis yang merupakan golongan-golongan tersebut. Masing-masing Soa mencakupi beberapa "Rumahtau" ialah gabungan dari beberapa "Matarumah", yang memilih dan mengangkat seorang diantara mereka sebagai pemimpin yang digelar "Kepala Soa".

Di pulau **Buru dan** di kepulauan Kei terdapat sejenis Negeri-negeri yang oleh Pemerintah Penjajahan dikualifikasikan sebagai "Streekgemeenscap", dikepalai oleh seorang Raja, sedang Negeri anggota gabungan dikepalai oleh seorang Kepala Soa.

Kehidupan rakyat sesuatu Negeri berkisar pada pencarian bertani dan nelayan. Jaminan terhadap "Means of kring" dari Negeri yang bersangkutan yang diberi nama "Petuanan Negeri", masing-masing dengan batas-batas yang nyata jelas diatur dan diakui diantara Negeri yang satu dengan Negeri tetangganya. Juga areal lautan yang terdapat di pesisir pantai Negeri diakui sebagai petuanan masing-masing Negeri. Rakyat dari sesuatu Negeri mempunyai **hak ulayat** (baschikkingrecht) yang diatur dan dibagi/ditunjuk oleh Pemerintah Negeri i.c. Raja masing-masing dalam batas-batas Petuanan Negeri.

Bentuk tata kehidupan masyarakat ini kemudian oleh Pemerintah Penjajahan dimodifikasikan untuk disesuaikan dengan tujuan utama dari penjajah, ialah "Exploitation del'homme par l' homme".

Sejarah telah membuktikan bahwa istilah asing yang diungkap ini bukanlah sesuatu isapan jempol belaka.

Daerah Pemerintahan ini berada langsung dibawah penguasaan Pemerintahan Pusat Hindia Belanda, lazim disebut juga "Gouvernementsgebieden", yang penerapannya diatur melalui sistem dekonsentrasi dengan pembagian daerah yang dikenal dengan nama mulanya "Gouvernement der Molukken" dengan seorang Gouverneur. **Kemudian diubah menjadi "Residentie Zuid-Molukken" dikepalai seorang Resident. Resident yang membawahi "Afdeling" dikepalai**

near the other goats heads slaughtered in the past years.

According to Subyakto, this ceremony is aimed to connect the meaning of offering done in the ancient time with the realization of offering at present. Such a case is also taking place among the Christian community such as among the people of Hutawanin Saparua and Tuhaha.

6. Public Administration

The Background

The Moluccas region during the Dutch colonial rule viewed from the point of public administration structure is implied in two kinds of form of administration organization, which are called the "rechtstreeks bestuurde gebieden" or "the directruled regions" (by the central Dutch colonial government) and "zelfbestuurde gebieden" or the "autonomous ruled regions" (ruled by the native leaders under the supervision of the Dutch colonial government). The first mentioned system is consisting of the regions which are now known with the names of "the Central Moluccas" and "the Southeast Moluccas" and "the Municipality of Ambon" (Gemeente Ambon). The three regions mentioned above in that time are included in the "Residenties der Zuid Molukken" or The Residential Territory of South Moluccas. The second naming is now the region of North Moluccas and the administrative region of Central Halmahera, which was in that time called the "Residentie der Noord Molukken" or the Residential Territory of North Moluccas.

In the region of the "South Moluccas" the government policy on the public administration is adjusted with the existing organisational stucture in the form which is called by the people "negeri" (the technical term nowadays is village).That form is classified into the term of "Territoriaal Genealogische Rechtsgemeenschappen" or the "Genealogic Law Community Territory".

The "negeri" in its substantial form and existence since early has already in the possession of its own public administration system whixh is composed and regulated by the inhabitants of the "negeri" itself, among others, which is very unique, that the "negeri" is ruled by two institutions having the legislative and executive status. The chief of the government is given the title of "raja" and is elected by the people through a voting system. In practice the "raja" is holding two functions as primary duty, namely :

- *Raja as the chief of the public administration (bestuurshoofd) of the "negeri" concerned.*
- *Raja as the head of the tradition and customs (adathoofd) in the domain of the traditional law community concerned.*

The legislative body of the "negeri" is known with the name of "saniri negeri". Here sit the representatives of the groups within the "negeri", while the executive body consists of the raja together with the "saniri patih" form the daily executive council. In general the "negeri" consists of some numbers of soa, namely groups of genelogic units. Each soa implies a number of "rumahtau" which is a collection of some houses "matarumah" which elect and appoint one among them to be the leader with the title of "kepala soa".

On the island of Buru and the Kei islands there are a type of negeris which are by the Dutch colonial government qualified as "streek-gemeenschap" or "local community" under the leadership of a raja, while the negeris of joined members headed by a kepala soa.

The living means of a "negeri" is consisting of agriculture and fishery. The assurance of "means of kring" of the negeri concerned, which is called "petuanan negeri", each with obvious real border, is clearly arranged and acknowledged among the negeris and the other neighbouring negeris. Also the sea areal which is situated in the coastal sides of the negeri is recognized as "petuanan" of each negeri. The people of a negeri has the right of "ulayat" (beschikkingsrecht) or the right to determine, which is arranged and divided/ appointed by the administration of the negeri, in this case, each raja within the borders of petuanan negeri.

The form of this society system later by the colonial government is modified to be adjusted primarily with the aims of the colonial government, namely "l'exploitation del'homme par l'homme".

The history has proved that this foreign expression is not a wishfullthinking at all.

This governmental region is straightly under the authority of the central government of the Dutch-Indies colonial rule, also common called the "gouvernements gebieden", or the "territories of the government", of which the application is regulated by the deconcentration system with areal divisions wellknown as "Gouvernement der Molukken" or the "government of the Moluccas" under the head of one Governor. later it was changed into der Zuid Molukken" headed by a Resident. Under him there are "afdeelings" headed by Assistant Resident, with under-districts with the "controleur" under the function of "hoofds van plaatselijk bestuur" (HPB) as the district head.

seorang Asisten Resident yang membawahi pula "Underafdeling" dengan Controleur yang bergelar "hoofd van Plaatselijk Bestuur (HPB)" sebagai kepalanya.

Dibawah Onderafdeling terdapat "Bestuursressort" yang dikepalai oleh seorang "Bestuurs Assistent", lazimnya berbangsa Indonesia, sedang yang diatasnya adalah kunci posisi yang dipegang hanya oleh bangsa Belanda.

Pada lingkungan "Residentie der Noord-Molukken" Pemerintah Penjajahan juga menyesuaikan policynya dengan struktur yang sedia sudah ada di Daerah itu. Bedanya ialah bahwa disana susunan tata pemerintahan semula telah teratur dan tersusun dalam bentuk Kesultanan yang dikepalai oleh tiga orang Sultan, ialah Sultan Ternate, Sultan Tidore dan Sultan Bacan.

Masing-masing Kesultanan dalam strukturnya terdiri dari sekian "District" dan "Onderdistrict" yang dikepalai oleh "Districshoofd" dan "onderdistrictshoofd" yang diangkat dan diberhentikan oleh Sultan yang bersangkutan. Gelaran mereka yang dikenal rakyat ialah "Sangaji". Setiap Sangaji membawahi sekian banyak "Kampung", dipimpin oleh seorang "Kepala Kampung" yang digelar "Mahimo". Seorang Mahimo diangkat dan diberhentikan oleh Sultan atas usul Sangaji yang bersangkutan.

Setiap Sultan memiliki teritorial ulayat sebagai hak miliknya turun temurun, yang oleh Pemerintah Penjajahan dibatasi atas pertimbangan politis ekonomis yang dituangkan dalam suatu "Perjanjian" yang dikenal dengan judul "Korte Verlaring".

Juga rakyat penduduk daerah kesultanan tersebut pada umumnya mempunyai nafkah pencarian di bidang tersebut dan nelayan. Perbedaan utama antara rakyat ini dengan rakyat di "Residentie der Zuid—Molukken" ialah bahwa mereka berada dalam daerah kesultanan itu tidak memiliki hak ulayat dan/atau hak milik atas tanah di lingkungan hidupnya, karena tanah itu adalah hak milik Sultannya.

Lain pengaruh ekologis yang sampai sekarang masih dirasakan ialah adanya "rigidsocial stratification" (mirip sekali dengan penggolongan atas dasar Kasta) yang ditemui dibeberapa wilayah di Dati II Kabupaten Maluku Tenggara.

Di Kepulauan Kei, kita jumpai penggolongan masyarakat 3 golongan sebagai berikut:

- Mel—Mel (Bangsawan)
- Ren—Ren (Tengah)
- Ri—Ri (Budak)

Di kepulauan Kisar, kita kenal:

- Marna (Bangsawan)
- Bur (Tengah)
- Stam (Budak)

Di kepulauan Aru, dijumpai:

- Rat (Raja atas)
- Kebanyakan (Bawah).

Pengaruh lingkungan dan ikatan historis tradisional yang dihayati dan dialami rakyat dalam kedua wilayah geografis yang diuraikan tadi, turut memberikan corak dan warna khas dalam bentuk tradisi, adat, kebiasaan dan tata kehidupan rakyat dimaksud yang jelas saling berlainan pula. Hal ini nampak sekali dalam sikap hidup (behavior) dan cara berpikir (mental attitude) dari rakyat itu yang juga memperlihatkan perbedaan-perbedaan phenomental sampai kepada corak dan warna kebudayaannya.

Tatkala pada 17 Agustus 1945 Proklamasi Negara Republik Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat berkumandang di seluruh penjuru tanah ini, maka penjajah Belanda dengan kelihaian politiknya yang umum sudah mengenal dengan istilah "devide et impera", sengaja di wilayah Kepulauan Maluku bekerja keras untuk mengelabui mata rakyat dengan berbagai siasat propaganda disertai incentives politis ekonomis agar rakyat tidak sampai meresapi dan menghayati makna inti dari Proklamasi itu. Akibat dari kelicikan penjajah tersebut, maka rakyat pada umumnya tidak atau sekali menyadari akan peristiwa bersejarah yang sebenarnya sudah melepaskan mereka dari genggaman penjajahan. Patut dikemukakan betapa tidak sedikit pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat bersama para pengikut mereka yang berdasarkan kesadaran dan keinsyafan yang mendalam tetap tidak membiarkan diri mereka dipengaruhi/dikelabui oleh propaganda penjajah tersebut, melainkan dengan semangat "Merdeka atau Mati" dengan gigih menentang dan memberi perlawanan dengan pelbagai cara, siasat dan muslihat. Banyak juga patriot-patriot pejuang Kemerdekaan di Daerah Maluku ini yang tanpa pamrih telah rela mengorbankan jiwa raganya.

Suasana politis yang agak bercorak dulistis itu dimana terasa seolah-olah rakyat dipecahkan dalam dua kelompok aliran politik, yaitu kelompok Pro dan Kontra Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia. Masih meliputi kondisi ekologis rakyat di Maluku tatkala pada Ultimo tahun 1950 Pemerintah Indonesia berhasil menghancurkan pemberontak apa yang disebut RMS. Dengan duduknya Pemerintah Republik Indonesia

Under the "onder-afdeeling" there are the "bestuur resorts" headed by a "bestuur assistent" of "assistant district head" which are in general consisting of Indonesian natives. Higher than this position all the offices are key positions only to be held by the Dutch.

In the region of the "Residentie der Noord Molukken" the Dutch colonial government also adjust their policy with the existing structure in that area. The difference is only that there the structure of public administration which was earlier in the ordered and well-regulated under the authority of the Sultanate headed by three sultans, namely the Sultan of Ternate, the Sultan of Tidore, and the Sultan of Bacan.

Each sultanate in each structure in consisting of so many districts an sub-districts headed by the district head and the sub-district head, which is appointed and dismissed by the sultan concerned. Their title popular among the people is "sangaji". Each sangaji rules over a number of kampungs (villages), which are headed by "kepala kampung" or village head with the title of "mahimo". A mahimo is appointed and dismissed by the sultan on the proposal of the sangaji concerned.

Every sultan has the "ulayat" territory as his hereditary right of possession, which is by the colonial government is restricted based on the political and aconomical consideration, which is stipulated in an agreement which is known as the "Korte Verklaring" or the "Short Statement".

Also the people of the sultanate concerned in general have the living means in the field of agriculture and fishery. The main difference between these people and the people in the "Residentie der ziud Molukken" is that they who are in the sultanate don't have the "ulayat" right and/or property right on the land in their living environment because the land is the property of the Sultan.

Another influence of the ecology which is up till now still to be felt is the existence of "rigid social stratification" (similar to the classification of castes) which is found in some regions in the districts of Southeast Moluccas.

On the islands of Kei we find three groups of people as follows :

- *Mel-mel (the noble class)*
- *Ren-ren (the middle class)*
- *Ri-ri (the slaves)*

On the islands of Kisar we know :

- *Marna (the noble class)*
- *Bur (the middle class)*
- *Stam (the slaves)*

On the island of Aru we can find :

- *Rat (the super king)*
- *Kebanyakan (the under ruled)*

The influence of the environment and the bond of traditional historical background which is experienced by the people in the two geographical regions discussed above, is also giving the characteristics of the typical form of tradition, customs, habits, and the system of living of the people concerned, which are clearly are different from one another. This fact is clearly seen in the life attitude (behaviour) and their way of thinking (mental attitude) of the people, who also demonstrate differences of phenomental to the characteristics of their cultures.

When on the 17th of August 1945 the proclamation of the Republic of Indonesia announced its independence and souvereignty throughout the archipelago of Indonesia, then the Dutch colonial rulers with their cunning political moves, which is in general known as the "divide et impera", they on purpose work hard to deceive the people of the Moluccas by various strategic propagandas accompanied with incentives on political and economic moves, so that the people cannot understand and apply the meaning of the proclamation. As the result of the cunning action of the colonial government, the people in general are not or very little aware of the most important historical event which in reality has already released them from the bond od colonialism. It should be noted that not a few of the prominent leaders and social pioneers together with their followers with great profound awareness remain not to be influenced by the colonial propaganda, but with the spirit of "freedom or death" they bravely challenge and attack the colonial rulers with various manners and stategies. Many of the patriots heroes for the independence in the Moluccas who are without any purpose of purchasing profits, have voluntarily offered their lives for the independence.

The political atmosphere of a dualistic characteristic where it is felt that the people seem to be divided into two groups of political tendencies, namely the group of pro and contra the independence of the people and the state of Indonesia.

Still covering the ecological condition of the people in the Moluccas, when in the ultimo of the year 1950 the Indonesian Government succeeded in crushing down the so called RMS (the Republic of South Moluccas). By the settlement of the Indonesian Republic government in the city of Ambon, it

di Kota Ambon, mulai tersuratlah lembaran sejarah Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat di Kepulauan Maluku. Namun kenyataan faktual itu tidaklah berarti bahwa Pemerintah di Daerah Maluku sudah berjalan baik. Kebingungan politik (political frustration) yang masih melanda sikap sebagian besar rakyat penduduk Maluku adalah tantangan seris bagi Gubernur Maluku yang pertama, Almarhum Mr JJ LATUHARHARY bersama semua aparatur Pemerintahan di Daerah untuk mulai berusaha memulihkan/menetraliser suasana politik yang serba kompleks yang merupakan warisan peninggalan penjajah Belanda yang telah dihalau keluar dari kepulauan Maluku. Roda sejarah perkembangan dan pertumbuhan Bangsa serta Pemerintahan Negara Indonesia terus berjalan dan sejak 17 Agustus 1945 Pimpinan Pemerintahan Propinsi Maluku pun mengikuti perkembangannya Gubernur Mr Latuharhary berturut-turut diganti oleh Gubernur M DJOSAN, Gubernur MUHAMAD PADANG dan Pd. Gubernur Kolonel GJ LATUMAHINA hingga medio 1968. Kemudian Pemerintah Pusat mempercayakan Sumitro untuk memegang Pimpinan Pemerintahan Daerah Propinsi Maluku sebagai Gubernur Maluku yang ke V mulai dari pertengahan tahun 1968 hingga 1973.

b. Pemerintahan Propinsi Maluku

Propinsi Maluku dibentuk dengan Undang-undang No 20 tahun 1958 dan terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan satu Kotamadya yakni Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Kotamadya Ambon. Keempat Kabupaten dan Kotamadya tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 60 tahun 1958.

Dengan Peraturan Presiden tanggal 1 Januari 1962 No 1/1962. Daerah Irian Jaya gaya lama telah dihapuskan dan dikembalikan kedalam wilayah Propinsi Maluku. Daerah ini atas Persetujuan Menteri Dalam Negeri per surat tanggal 15 April 1969 No Pemda 2/1.33 di bawah Gubernur Maluku.

Secara administratif Propinsi Maluku terbagi kedalam 5 (lima) Daerah Tingkat II yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya (Ambon) dan 4 (empat) Kabupaten yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan Halmahera Tengah, 56 (lima puluh enam) Kecamatan dan 1.790 buah Desa.

Usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan baik di tingkat Propinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kotamadya selalu mendapat perhatian. Karena upaya pendayagunaan aparatur pemerintah adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan daerah. Dengan demikian kegiatan pendayagunaan Aparatur Pemerintah yang berjalan sekarang ini adalah merupakan kelanjutan dan peningkatan langkah-langkah usaha yang telah dilakukan pada Pelita I, II, dan III dan sebahagian juga ditujukan untuk memecahkan masalah yang belum dapat ditangani dalam Pelita sebelumnya. Dalam Pelita IV sekarang ini langkah pendayagunaan Aparatur Pemerintah telah berkembang sekalipun masih dihadapkan kepada masalah-masalah baru.

Menyadari bahwa Kecamatan sebagai garis terdepan dalam pembinaan pedesaan di wilayah, maka organisasi aparat pemerintahan yang ada di tingkat Kecamatan masih dirasakan kurang jika dibandingkan dengan lajunya pembangunan serta tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin memerlukan penanganan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan kenyataan sampai akhir PELITA III sebagian besar Dinas dan Jawatan belum terdapat disemua kecamatan. Seandainya Dinas dan Jawatan ada disalah satu Kecamatan, maka tenaga personalnya sangat kurang yaitu hanya satu atau dua orang saja, sehingga kadangkala menyebabkan terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan pada tingkat desa didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti penyuluhan dan lain-lain.

Sampai dengan akhir PELITA III di Propinsi Dati I Maluku telah diusahakan beberapa hasil tambang seperti Nikel di Pulau Gebe, Mangan di pulau Doi, Minyak tanah di Bula namun hingga saat ini di Maluku belum terdapat Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penelitian, pengembangan, pengawasan belum terkoordinir dan dijalankan secara intensif. Sampai saat ini bidang Pertambangan dan Energi ditangani oleh Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi Sulawesi Utara.

Usaha penyempurnaan Administrasi Pemerintahan Desa juga telah dilakukan sehingga akan lebih mendorong Swadaya dan Swakarya Masyarakat Desa sendiri. Dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa semakin dimanfaatkan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan sebagai sistem perencanaan pembangunan terpadu di Tingkat Kecamatan untuk pembangunan desa menjadi desa Swasembada.

Bertolak dari tujuan pembangunan Daerah Maluku, yang mana bertujuan untuk menunjang dan mengisi Pembangunan Nasional

begins to be recorded as the historical events of the government of the Republic of Indonesia, fully independent and souvereign in the Moluccas archipelago. Nonetheless of the factual situation does not mean that the government in the Moluccas is already running well. Political confusion (political frustation) which is overwhelming a great part of the population of Moluccas is a serious challenge for the first governor of the Moluccas, namely the late Mr JJ Latuharhary together with the whole government apparatus in the region to begin the attempts to rehabilitate or neutralize the political situation of complex characteristics which is an inheritance of the colonial government that has been cast out from the Moluccas archipelago. The development and the growth of the Indonesian people and government is running on, and since 17th August 1945 the leader of the province of Moluccas follow the development.

The Governor Mr Latuharhary respectively is substituted by the Governor M Djosan, Governor Mohammad Padang, and the Acting-Governor Colonel GJ Latumahina till medio 1968. Then the central government trusts Sumitro the become the governor of the province of Moluccas as the fifth governor in the Moluccas beginning with medio 1968 till 1973.

The province of Moluccas is formed on the Law no 20 in the year 1958 and is comprising three districts and one municipality, namely the District of North Moluccas, the District of Central Moluccas, the district of Southeast Moluccas, and the Municipality of Ambon. The four districts and municipality concerned are formed under the Law no 60 in the year 1958.

Under the Presidential Decree dated 1st January 1962 no 1 /1962, the Irian Jaya region of old order has been eliminated and returned to the territory of the province of Moluccas. This region on the approval of the Minister of Domestic Affairs based on the letter dated 15th April 1969, No Pemda 2/1.33 is put under the authority of the Governor of the Moluccas.

From the point of administrative views the province of Moluccas is divided into five districts, consisting of one municipality (Ambon)and four districts, namely North Moluccas, Central Moluccas, Southeast Moluccas and Central Halmahera ; 56 subdistricts and 1790 villages.

The attempts to perfect the government organization either in the provincial level or in the district level/municipality is always paid attention to. Because the attempts to increase effectiveness of the government apparatus is a part that is not separable from the regional development. Doing so the activities on the attempts to make effective governments apparatus nowadays is a continuation and enhancement of the steps in the attempts that have been done in the Pelita I, II and III, and a part also destined to solve problems not yet tackled in the previous Pelitas. In the Pelita IV presently the steps taken to make effective the government apparatus have been developing although still being faced with new problems.

Being aware of the position of the sub-districts as the front-line of the promoting of villages in this region, the existing government apparatus on the level of sub-district is still felt to be lack of, if compared with the speedy development and the duties in executing the public administration which is more and more needing actions to make efficient and effective results.

Based on the reality up till the end of Pelita III in all sub-districts are not yet found the necessary apparatus and government service institution. If the institution and service is present in one of the sub-districts, the personnels are quite few, namely only one or two persons present, so that sometimes causes the retardness of work that should be finished on the village level in giving the service to the public like information and the like.

To the end of Pelita III in the province of the Moluccas a number of mining products have been exploited like nickel on the island of Gebe, mangan on the island of Doi, crude oil in Bula. But up till now in the Moluccas there is still no official gobernment office for the affairs of mining and energy, so that the works in relationship with research, development, supervision, are not yet coordinated and carried out intensively. Up till the present the field of mining and energy is tackled by the office of mining and energy in the province of North Sulawesi.

The attempts to accomplish the public administration in the villages also have been done, so that it can stimulate the self-innitial and self-working spirit of the society itself. As the follow-up of the Law no 5 in the year 1979 on the rural public administration, the system of regional working units of development is more utilized as the system of planning the integrated development on the level of sub-districts for the village development to become the self-supporting villages.

Departing from the aim of the development of the province of Moluccas, of which the purpose is to sustain the national development as the implementation of the Pancasila, through the active participation of the region of the province of Moluccas in the realization of the development to reach the righteous and prosperous society, equitable material and spiritual aspects based on the Pancasila and the 1945 Constitution, the relationship between the central government and the regional government is done within the system

sebagai pengamalan Pancasila melalui partisipasi aktif Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dalam pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah dilakukan atas dekonentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan semakin dikembangkan. Usaha ini antara lain dengan menserasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun regional serta koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, berjalan sesuai dengan kebijaksanaan dan program pembangunan, maka pengawasan dan penertiban operasional merupakan usaha penting yang harus dilakukan secara terus menerus. Mengingat kondisi geografis Propinsi Maluku, maka dalam hal pengawasan memerlukan penanganan khusus agar pengawasan dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dimana proyek-proyek pembangunan sedang dan telah dilaksanakan.

Wilayah otonom di Propinsi Dati I Maluku yang mempunyai luas wilayah 85.728 Km², terbagi atas Kabupaten Maluku Utara seluas 22.429 Km², Maluku Tengah seluas 29.089 Km², Maluku Tenggara seluas 24.768 Km², Kotamadya Ambon seluas 315 Km², dan wilayah Administratif Halmahera Tengah 9.116 Km².

of deconcentration, decentralization, and the sustaining tasks are more developed. Within this attempts it is intended to harmonize the planning activities and the realization of development, either sectoral or regional, and the coordination and supervision of development. In order that the carrying out of the public administration and the realization of development run in accord with the policy and program of the development, then the supervision and operational law enforcement are important efforts that should be done continuously.

Taking into consideration of the geographical condition of the province of the Moluccas, then in the case of supervision there should be special action taken so that the supervision could reach the remote places where the development project are or being realized.

The autonomous region in the province of Moluccas is covering 85.728 km2 divided in the District of North Moluccas as wide as 22.429 km2, the Central Moluccas 29.089 km2, the Southeast Moluccas 24.768 km2, the municipality of Ambon 315 km2 and the administrative region of Central Halmahera covering 9.116 km2.

B A B / *CHAPTER II*

PEMBANGUNAN DAERAH

REGIONAL DEVELOPMENT

KEADAAN alam Propinsi Maluku dan potensi wilayahnya terkait dengan masalah pembangunan yang masih dititikberatkan pada pembangunan pertanian. Pertanian masih merupakan sumber mata pencaharian utama penduduk Maluku. Sekitar 80 persen penduduk yang tinggal di pedesaan dan dengan pulau-pulaunya yang tersebar dan memencil, secara langsung masih terkait dengan kehidupan sebagai petani atau nelayan.

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahan mulai sejak Pelita I sampai sekarang sudah banyak memberi manfaat dan perubahan tingkat hidup penduduk Maluku secara merata. Walaupun demikian masih banyak masalah-masalah mendasar yang harus ditanggulangi untuk masa yang akan datang.

Adapun masalah pokok yang penting dihadapi daerah ini antara lain: masalah kualitas tenaga kerja dan kependudukan yang tidak merata disetiap wilayah atau pulau; masalah perhubungan yang belum memadai serta belum terciptanya pola perhubungan yang terpadu; masalah pendidikan, yang menyangkut belum meratanya penyebaran guru, kurangnya pembinaan kurikulum serta ketidakseimbangan antara pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan dan keahlian; masalah kesehatan dan keluarga berencana khususnya yang menyangkut beberapa penyakit yang bersifat epedemis, kurangnya tenaga dokter dan para medis lainnya; masalah pangan, yang menyangkut meratanya tingkat pemenuhan karbohidrat serta usaha pemenuhan protein, mineral, vitamin dan lain-lain, dalam rangka tercapainya standar gizi yang optimum baik yang berasal dari tanaman pangan peternakan maupun dari perikanan; dan masalah peningkatan dan pengembangan produksi berbagai komoditi perdagangan serta produksi industri dalam upaya peningkatan dan perluasan ekspor non migas.

Sejalan dengan masalah tadi dengan berpedoman kepada Pola Dasar Pembangunan Daerah. Pembangunan Propinsi Maluku ditekankan pada beberapa prioritas:

a. Peningkatan pelaksanaan pemukiman kembali penduduk sebagai usaha pemerataan penyebaran penduduk dan penambahan tenaga kerja. Sektor yang perlu mendapat perhatian adalah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pembangunan Daerah dan Kota.

b. Peningkatan penyediaan fasilitas perhubungan baik prasarana maupun sarananya serta usaha penciptaan suatu pola perhubungan yang terpadu. Sektor yang mendapat prioritas dalam kaitan ini adalah sektor Perhubungan dan Pariwisata.

c. Peningkatan Pendidikan baik kualitas maupun kuantitas. Dalam kaitan ini sektor yang perlu mendapat prioritas adalah sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sektor Agama.

d. Peningkatan Pendidikan kesehatan dan Keluarga Berencana. Sektor yang mendapat prioritas dalam kaitan ini adalah sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana, khusus sub sektor Kesehatan dan sub sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana.

e. Peningkatan produksi pangan dan gizi. Sejalan dengan prioritas pengembangan aspek-aspek ini, maka sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas adalah sektor Pertanian dan sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana khususnya sub sektor Kesehatan, Program Perbaikan Gizi dan sub sektor Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita, Program Peranan Wanita.

f. Peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran Perdagangan. Sektor-sektor yang perlu mendapat prioritas pengembangan adalah Pertanian dan Pengairan khususnya sub sektor Pertanian, sektor Industri, sektor Pertambangan dan Energi, sektor Perdagangan dan Koperasi dan sektor Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.

g. Peningkatan pembinaan dunia usaha nasional, golongan ekonomi lemah dan koperasi. Sektor yang diprioritaskan dalam hubungan ini adalah sektor industri dan sektor Perdagangan dan sektor Koperasi.

h. Peningkatan penataan kembali penggunaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah. Sektor yang perlu mendapatkan prioritas adalah sektor Pembangunan Daerah, Desa dan kota.

Sejalan dengan prioritas tersebut Pemerintah Daerah Maluku menetapkan suatu strategi Pembangunan yang selalu bertitiktolak kepada upaya meningkatkan kreatifitas, mutu dan efisiensi.

Bertolak dari rumusan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Maluku tentang hakekat pembangunan Daerah Maluku tadi,

THE NATURAL condition and regional potentialities of the province of Moluccas is in dose relationship with the development problems are still emphazed on the development of agriculture. The agriculture is still forming the main living means for the population in the Moluccas. About 80% of the poplulation who are living in the rural areas and with the many islands scattered and remoted, it is directly related to the living system as farmers or fishers.

The development that have been realized phase by phase beginning since Pelita I till the present has give many benefits and changes to the living standard of the population in the Moluccas distributed equitable. Nevertheless ther are still many basic problems that shoud be overcome for the future.

The main problems faced by this region is among others : the problem of manpower quality and the uniequitable distribution of population in every region or island ; the poblems on communication, which is covering the aspects of infrastructure and means of communication which is not yet, adequate and not yet created a pattern of integrated communication ; the problems on the education, which is relating the unequitable distribution of teachers, lack of curriculum realization, and the unbalanced condition between the general education and the vocational and professional education ; the problems on health and family planning, in particular concerning certain diseases of endemic symtems, lack of doctors and para medical labour force; the problems on food, in relationship with equitable level of carbohydrate supply, and the supply of protein, minerals, vitamins, etc. within the reaching of nutritional optimum standard, either originating, from the foodstuff crops, animal husbandry, or from the fishery; and the problems of enhancement and blooming of production of several trade commodities, and the industrial producation in the attempts to accelerate and extensify the non-oil and gas export commodities.

Parallel to those problems, with the guidance of the basic pattern of regional development, the development of the province of Moluccas is emphasized on several priorities :

a. The acceleration of the realization of re-settlement of the population as the attempts to equitable distribution of population and the increase of labour force. The sector that should be paid attention to is the labour force and trasmigration, the regional development and the municipality.

b. The acceleration of comunication facilities, either the infrastructure or the means, and the attempts to create a pattern of integrated communication. The sector on which the priority is put on in this relationship is the sector on communication and tourism.

c. The acceleration of education, either from the point of view of the quality or the quantity. Within this relationship the priority secot is the sector of education, the young generation, the national culture, and the belief in one supreme God and the sector on religious affairs.

d. The acceleration of health education and family planning. The priority sector in this relationship is the sector of health, social welfare, the female roles in the society, demography and family planning, especially the sub-sector of health and sub-sector of demography and family planning.

e. The acceleration of foodstuff products and nutrition. parallel to the priority to develop these aspects, the sectors necessary to get priorities are : the agricultural and health sector, social welfare, the females roles in the society, demography and family planning, subsector of health, programs on nutrition betterment, and subsector on social welfare and the women's role, programs of women's role.

f. The increase of production, arrangement and marketing of trade and commerce. The sectors necessary to get priorities to be developed are agriculture, irrigation, especially the subsector on agriculture, industrial sector, sector of mining and energy, sector on trade and commerce and cooperatives, and the sector of science and research.

g. The increase of national enterprise world and the puny economic group and the cooperatives. The sector having the priority in this relationship in the industrial sector, the trade and commerce sector, and the sector on cooperatives.

h. The acceleration of re-arrangement of land use and land property including the transfer of property right on the land . The sector necessary to get priority is the sector on regional development, villages and municipal development.

Parallel to the priorities mentioned aboved the regional government of the Moluccas decided a strategy of development that is always starting from attempts in increasing creativities, standard and efficiency.

maka secara umum strategi yang akan ditempuh adalah mengusahakan adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui langkah-langkah untuk mendorong dan memperbesar prakarsa dan partisipasi sumber daya manusia dalam proses pembangunan serta meningkatkan kreativitas, produktivitas, mutu dan efisiensi, melalui strategi:

a. Mempercepat pemilikan asset utama produksi.
b. Peningkatan dan perluasan kesempatan pendidikan.
c. Perbaikan dan peningkatan kesempatan pendidikan.
d. Pemecahan masalah kependudukan dan perluasan kesempatan kerja.
e. Meneruskan pembangunan perhubungan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial.
f. Memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia, tetap dalam kerangka keadaan lingkungan masyarakat baik lingkungan fisik, sosial ekonomi dan sosial budaya.
g. Keserasian laju pertumbuhan di dalam daerah, antar daerah tingkat II dan antar wilayah pengembangan.
h. Penggunaan pendekatan regional yang sejalan dengan pendekatan sektoral melalui strategi pengembangan tata ruang yang diwujudkan dalam bentuk sistem perwilayahan pembangunan.

Keseluruhan strategi tadi dimaksudkan untuk menjamin suatu efisiensi dan optimalisasi potensi daerah dalam pengelolaan sektor pertanian sebagai salah satu sektor diprioritaskan dalam pembangunan daerah Maluku.

Sejalan dengan strategi tersebut, maka pembangunan diberbagai sektor yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya dan lain-lain makin ditingkatkan sepadan, agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dihadapi dalam bidang ekonomi.

Untuk lebih menjamin terciptanya pembangunan yang serasi dan seimbang di seluruh wilayah Propinsi Maluku, sejalan dengan strategi dan pola dasar pembangunan daerah Maluku selama kurun waktu Pelita III dan IV ditempuh suatu strategi perwilayahan yang berupa kebijaksanaan spatial dimana seluruh wilayah daerah Maluku dibagi atas sejumlah wilayah pengembangan yang didasarkan kepada sistem nilai, sosial, budaya, kegiatan-kegiatan ekonomi yang saling berkaitan: kondisi geografi iklim, potensi, sumber daya yang tersedia dan hirarki dari pusat-pusat pemukiman, sebagai berikut:

a. Wilayah pengembangan Morotai dengan kegiatan utamanya pertanian perkebunan dan pertambangan.
b. Wilayah pengembangan Halmahera Utara Bagian Timur dengan kegiatan utamanya perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan.
c. Wilayah Pengembangan Halmahera Utara Bagian Barat dengan kegiatan utamanya pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, perindustrian dan pariwisata.
d. Wilayah Pengembangan Halmahera Tengah Bagian Utara dan Barat dengan kegiatan utamanya pertanian, perkebunan, kehutanan dan perindustrian.
e. Wilayah Pengembangan Halmahera Timur dengan kegiatan utamanya perikanan, perkebunan dan pertambangan.
f. Wilayah Pengembangan Halmahera Selatan dengan kegiatan utamanya perikanan, perkebunan dan pertambangan.
g. Wilayah Pengembangan Kepulauan Sula dengan kegiatan utamanya kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan.
h. Wilayah Pengembangan Buru dengan kegiatan utamanya perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan dan perindustrian.
i. Wilayah Pengembangan Seram Barat dengan kegiatan utamanya perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan dan perindustrian.
j. Wilayah Pengembangan Seram Utara dengan kegiatan utamanya perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan, industri dan pariwisata.
k. Wilayah Pengembangan Seram Timur dengan kegiatan utamanya perikanan, perkebunan dan pertanian.
l. Wilayah Pengembangan Seram Selatan dengan kegiatan utamanya perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan dan pariwisata.
m. Wilayah Pengembangan Ambon dan Lease dengan kegiatan utamanya perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian dan pariwisata.
n. Wilayah Pengembangan Kei dengan kegiatan utamanya, perikanan, perkebunan dan perindustrian.
o. Wilayah Pengembangan Aru dengan kegiatan utamanya perikanan, perindustrian dan perkebunan.
p. Wilayah Pengembangan Tanimbar dengan kegiatan utamanya pertanian dan perindustrian.
q. Wilayah Pengembangan Babar, Leti, Moa, Laker dan Pulau-pulau terselatan dengan kegiatan utamanya peternakan, pertanian, perikanan dan perindustrian.

Starting from the definition on the basic pattern of regional development the provinceog the Moluccas about the principle of the development of the province of Moluccas concerned, then in general the strategy that should be taken is to attempt the acceleration and equitable distribution of public income by taking steps to stimulate and enlarge the initiatives and participation of human resources in the process of development and accelerating the creativities, productivities, standard and efficiency, by strategy :

a. To speed up the possession of main assets of production.
b. To accelerate and extensify the opportunities of education.
c. To accelerate and improve the standard of education opportunities.
d. The solving problems on the demographic difficulties and the extensification of employment opportunities.
e. To continue the development on communication to sustain the economic and social development.
f. To enhance and improve the human resources remaining within the frame of the social environment, either physical environment, social-economic or socio-cultural environment.
g. To harmonize the growth rate in the region, interdistrict and inter-regional development.
h. To utilize the regional approach that is parallel to the sectoral approach by the strategy of spatial development which is relized in the development system based on rgions.

The whole strategy mentioned above are aimed to secure and efficiency and optimalization of regional potentialities in the exploitation of agricultural sector as one of the sector that is getting priorities in the development of the province of Moluccas.

In line with the strategy concerned the development in various sectors closely related to political field, social, etc. is more and more accelerated, so that they can sustain each other with the improvements faced in the field of economy.

To assure more steady development of good harmony and well-balanced in the whole province of Moluccas parallel with the strategy and basic pattern of the development of the province of Moluccas, during the period of Pelita III and IV, is carried out a strategy on regions in the form of spatial policies where the whole region of the Moluccas is divided on a number of developing regions a based on the value system, social, cultural, economic activities, which are relating one nother ; the geographical condition, climate, potentiality, the existing resources, and the hierarchy of the centres of settlement, as follows :

a. The development region of Morotai with the main activities on agriculture, plantation, and mining.
b. The development region of Nort Halmahera in the Eastern Part with the main activities on plantation, agriculture, forestry and fishery.
c. The development region of North Halmahera in the Western Part, with its main acitivites on agriculture, forestry, plantation, fisher, industry, and tourism.
d. The devlopment region of the northern and sestern part of Central Halmahera with the main activities on agriculture, plantation forestry and industry.
e. The development region of East Halmahera with the activities on fisher, plantation, and mining.
f. The development region of South Halmahera with its activities on fisher, plantation, and mining.
g. The development region of the islands of Sula with the main activities on forestry, plantation, agriculture and fisher.
h. The development region of Buru island with the main activities on plantation, forestry, agriculture, fishery and industry.
i. The development region of West Seram with the main activities on plantation, agriculture, forestry, fishery and industry.
j. The development region of North Seram with its main activities on the plantation, forestry, agriculture, mining, fisher, industry and tourism.
k. The development region of East Seram with its main activities on fisher, plantation, and agriculture.
l. The development region of South Seram with its activities on plantation, forestry, agriculture, fisher, and tourism.
m. The development region of Ambon and Lease with its main activities on plantation, agriculture, fisher, industri and tourism.
n. The development region of Kei with its main activities on fishery plantation, and industry.
p. The development area of Tanimbar with its main activities on agriculture, and industry.
q. The development region of Babar, Leti, Moa, Lakor and the mosth souther islands, with its main activities on animal husbandry, agriculture, fishery and indusry.

By the implementation of priority system in the Moluccas in the period of Pelita III and IV, in the efforts of the continuation of the development in Pelita I, the policy taken in Pelita III is carried out further and improved

Ditetapkannya sistem prioritas pembangunan di Propinsi Maluku dalam kurun waktu Pelita III dan IV, dalam upaya kesinambungan pembangunan dalam Pelita IV, kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh dalam Pelita III dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup dan kecerdasan serta kesejahteraan yang makin merata dan adil untuk menunjang terciptanya kerangka landasan untuk tinggal landas. Dalam hubungan ini, pembangunan daerah tetap tertuju pada pengembangan dan perbaikan mutu kehidupan sumber daya manusia dengan meletakkkan titik berat pembangunan pada bidang ekonomi untuk melanjutkan usahanya yang berhubungan dengan peningkatan pengembangan kegiatan produksi perdagangan serta usaha untuk mendorong tumbuhnya industri yang tetap meneruskan pembangunan perhubungan untuk mendorong pembangunan ekonomi sosial. Dalam kaitannya dengan permasalahan sistem prioritas dalam pembangunan, maka sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku berbagai Kebijaksanaan sektor dalam Pelita III diteruskan kembali selama Repelita IV Daerah.

Dengan adanya upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di Propinsi Maluku untuk mencapai sasaran tadi, maka produksi pertanian meningkat sekitar 3,6% setahun, sektor pertambangan serta galian sekitar 10% setahun, sektor industri sekitar 35%, sektor listrik dan air minum sekitar 20%, sektor bangunan 8%, sektor perdagangan sekitar 9%, sektor perhubungan dan komunikasi sekitar 15% dan sektor-sektor lainnya sekitar 3,4%.

Sebagai akibat dari laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut, diperkirakan produksi domistik regional (bruto PDRB) daerah Propinsi Maluku meningkat sekitar 7% setahun selama Repelita IV. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sekitar 2,89% pertahun pendapatan per kapita meningkat dengan rata-rata 4,11% setahun atau kenaikan sebesar 19,5% pada akhir Pelita IV apabila dibandingkan dengan keadaan pada akhir Pelita III.

Untuk pelaksanaan Repelita IV Daerah dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 7% setahun serta berbagai sasaran pembangunan lainnya diperlukan dukungan investasi yang memadai.

Secara kuantitatif, jumlah investasi yang diperlukan selama Repelita IV di daerah ini adalah Rp 1.139,99 milyar, dalam mana 57% dari padanya atau ± Rp 650 milyar diharapkan berasal dari sektor pemerintah dan 43% atau ± Rp 489,99 milyar berasal dari sektor non Pemerintah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah Maluku sekitar 7% selama Repelita IV, diharapkan laju pertumbuhan Daerah Tingkat II Maluku Utara sekitar 7,03% setahun, Daerah Administratif Halmahera Tengah sekitar 6,44%, Daerah Tingkat II Maluku Tengah 6,81%, Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sekitar 7,34% dan Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon sekitar 7,38%.

Sumber-sumber Dana Pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan pemerataan yang lebih baik terhadap pembagian hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan selama Pelita III, diperlukan pengerahan dana yang memadai, baik dana pembangunan maupun dana rutin. Keperluan dana tersebut tidak hanya mencakup untuk pembiayaan rencana pembangunan di sektor Pemerintah tetapi juga meliputi kegiatan sektor non Pemerintah.

Pengarahan dana di sektor Pemerintah berasal dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui proyek-proyek sektoral serta program INPRES dan dari Pemerintah Daerah melalui APBD. Sedangkan di Sektor Non Pemerintah berasal dari kegiatan swasta dan swadaya murni masyarakat. Disamping itu, guna menunjang kegiatan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan pula biaya rutin yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pengerahan, khususnya dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terkait dan terpadu pada landasan Trilogi Pembangunan, selalu diusahakan dengan berpegang teguh pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis.

Dalam kaitan semuanya ini, maka realisasi pengerahan dana selama Pelita III di Maluku seluruhnya berjumlah Rp 691.404,10 juta. Dalam mana 57,57% atau Rp 398.010,53 juta berasal dari sektor Pemerintah sedangkan Rp 293.393,57 juta dari sektor Non Pemerintah. Dari jumlah tersebut Rp 593.511,95 juta atau sekitar 85,84% dilaksanakan untuk biaya pembangunan sedangkan Rp 97.892,15 juta atau sekitar 14,16% untuk biaya rutin. Lihat Tabel II-1.

Selama pelaksanaan Pelita III alokasi biaya pembangunan di Maluku seluruhnya berjumlah Rp 593.551,95 juta, dari jumlah tersebut 50,57% berasal dari sektor Pemerintah, 44.83% berasal dari investasi swasta dan 4,60% dari swadaya murni masyarakat. Dalam tahun pertama Pelita III alokasi biaya pembangunan dari sektor Pemerintah berjumlah Rp 32.761,43 juta, meningkat rata-rata 3,23% per tahun sehingga mencapai Rp 75.542,46 juta di tahun terakhir Pelita III.

Alokasi biaya pembangunan dari sektor Pemerintah dikelola melalui proyek-proyek sektoral; program INPRES, Dana APBD Daerah Tingkat

so that it can be felt more relistic that the standard of living is blooming and the intelligence and welfare are more equitable and rightful distributed to sustain the basic frame for the development take-off. In this relationship the regional development is still airmed on the development and improvement of standard of living, human resources, by emphasixing the development in the field of economy to continue its efforts in close connection with the increase and improvement of trade and commerce production activities and the attemps on stimulating the growth of industry that continues the communication development to evoke the development on socioeconomic field. In the relationship with the problems and system of priority in the development, in accord with the basic pattern development in the region of the Moluccas, several policies are taken in the sector of Pelita III, are continued during the regional Pelita IV.

By the efforts of the regional government to improve the development activities in the province of Moluccas in order to achieve the targets mentioned above, the agricultural products are increasing approximately 3,6% a year, the mining and digging sector about 10% a year, the industrial sector about 35% a year, the sector on electricity and drinking water about 20% a year, the construction sector about 8% a year, the sector on trade and commerce about 9% a year, the sector on transportation and communication about 15% year, and other sector about 3,4% a year.

As the results of te speedy growth of the developmentof the sectors concerned, it is estimated that the gross domestic regional product of the province of Moluccas is increasing about 7% a year during Repelita IV. By the population growth rate about 2,3% a year, the income per capita ha simproved to the average of 4,11% a year or an increase of 19,5% at the end of Pelita IV if compared with the situation at the end of Pelita III.

For the relization of the regional Pelita IV with the objective on the economical growth rate speed within the everage of 7% a year and other objectives of development, an adequate sustaining investment is needed.

Quantitatively the amount of investment needed during Pelita IV in this region is Rp 1.139.99 billion, of which 57% or Rp 650 billion is expected from the government sector, and 43% or Rp 489.99 billion is expected from the non-government sector.

By the economic growth speed in the Moluccas about 7% during Pelita IV is expected that the growth speed of the development in the district of North Moluccas about 7,03% a year, the adminstrative region of Central Halmahera about 6,44% a year, the district region of Central Moluccas about 6,81% a year, the district region of Southeast Moluccas about 7,34% a year, and the municipality of Ambon about 7,38% a year.

Funds Resources for the Development.

In the efforts to realize the equitable better distribution on the development success and economic growth which is planned during Pelita III, an adequate funds raising is needed, either the development funds are not only implying the expenses on the development planning on the government sector but also covering the activities on non-government sector.

The funds raising in the government sector originates from the central government distributed through the sectoral projects and the Inpres programs and from the regional government through the regional revenue and budget. In the non-governement sector are originating from the private activities and the pure society's self-initials. Besides that, for the purpose of sustaining the development activities which is more and more increasing, an improving routine expenses are also needed from year to year.

The funds raising, especially in the form of the regional revenue and budget, which is in close relationship and integrated with the basic development trilogy, it is always tried by holding the orientation on the principle of well-balanced dynamic budget.

Within all of these, the realization of funds raising of Rp691.404,10 milion of which 57,57% or Rp 398.010.53 million is from the government sector, while the Rp293.393,57 million from the non-government sector. From thesum concerned Rp593.511,95 million or about 85,84% is realized for the expense of development, while Rp97.892,15 million or about 14,16 for the routine expenses. See Table II – 1

During the realization of Pelita III the allocation of development expenses in the Moluccas, on the whole is Rp593.551,95 million, of which sum 50,7% is from the government sector, 44,83% is from the private investment, and 4,60% is from the pure society's self-initiatives. In the first year of Pelita III the allocation of development expenses of the government secton is Rp32.761,43 million, increases at the average of 3,23% per year so that it reaches Rp75.542,46 million in the last year of Pelita III.

The allocation of the development expenses from the government sector is managed through sectoral project; the Inpres program, the regional revenue and budget funds of the province and the district, and other funds.

Of the aggregate development expenses 55,14% is managed through the sectoral project with the average increase as much as 27,50% a year or boost

I dan Daerah Tingkat II serta dana-dana lainnya.

Dari seluruh pengeluaran pembangunan tersebut 55,14% dikelola melalui proyek-proyek sektoral. Dengan peningkatan rata-rata sebesar 27,50% per tahun atau meningkat sebesar 164,26% pada tahun terakhir Pelita III dibanding dengan tahun pertama Pelita III.

Dalam periode yang sama pengeluaran pembangunan yang bersumber dari program INPRES sejak tahun I sampai dengan tahun terakhir Pelita III telah meningkat dengan pesat. Sumber ini hanya sebesar Rp 4.611,54 juta maka pada tahun terakhir telah mencapai Rp 17.309,16 juta dengan peningkatan sebesar 275,32% atau rata-rata per tahunnya meningkat 39,19%. Dengan demikian jumlah alokasi biaya pembangunan melalui program INPRES selama Pelita III sebesar Rp 58.618,70 juta atau 19,53% dari seluruh alokasi biaya sektor Pemerintah. Dari jumlah tersebut 49,68% digunakan untuk pembangunan, sarana Sekolah Dasar, 14,83% untuk penunjangan jalan Kabupaten kemudian 14,57% untuk bantuan Desa, menyusul bantuan Daerah Tingkat II sebesar 11,80%, sedangkan sarana Kesehatan dan bantuan pemugaran pasar masing-masing sebesar 6,85% dan 2,22%.

Selanjutnya dengan perkembangan pembangunan, kemampuan daerah pun meningkat dalam menghimpun dana untuk membiayai proyek-proyek pembangunan daerah.

Selama Pelita III alokasi biaya pembangunan melalui APBD Dati I dan Dati II sebesar Rp 51.704 juta atau sekitar 17,23% dari seluruh dana pembangunan sektor pemerintah. Realisasi APBD tersebut dalam tahun pertama Pelita II sebesar Rp 5.915,70 juta meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp 13.849,25 juta pada tahun terakhir suatu peningkatan sebesar 134,11% atau rata-rata setahun meningkat dengan 23,70%. Lihat Tabel II-2.

Disamping dana Pembangunan yang bersumber dari Sektor Pemerintah, maka untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Daerah pun telah berusaha mendorong penanaman modal swasta dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Selama Pelita III sektor Swasta telah menginvestasikan dana sebesar Rp 266.060,47 juta atau sekitar 16,95% dari dana yang sama. Dari nilai tersebut Rp35.694,07 juta diinvestasikan dalam Sektor Industri Kehutanan dan Rp29.765,68 juta, dalam Industri Perikanan sedangkan **Investasi Swasta lainnya terdiri dari Aneka Industri sebesar Rp 59.865,16 juta, Industri Kecil sebesar Rp 555,57 juta dan Industri Logam Dasar** sebesar Rp6.179,74. Lihat Tabel II-3.

1. Proyek Pelita Nasional

Proyek Pelita Nasional di Propinsi Maluku dalam pelaksanaannya sejak periode Pelita I sampai Pelita III memperlihatkan trend yang menaik sejalan dengan perkembangan pembangunan itu sendiri. Proyek-proyek Pelita Nasional tersebut meliputi Proyek di bidang sosial,

Tabel / *Table II — 1*

JUMLAH PENGERAHAN DANA SELAMA PELITA III DI MALUKU
(DALAM JUTAAN RUPIAH)
THE AMOUNT OF FUNDS RAISING IN THE MOLUCCAS
(IN RP MILLION)

No	Sumber Dana *Funds resources*	Jumlah *Total*	%	Keterangan *Remark*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan/*Development*	593.511,95	85,84	
	- Sektor Pemerintah/ *The Government sector*	300.118,38	43,41	
	- Sektor Swasta *The Private sector*	266.060,22	38,84	
	- Swadaya Murni Masyarakat *The pure society's self initiatives*	27.333,35	3,95	
2.	Rutin/*Routine*	97.892,15	14,16	
	- Subsidi Pemerintah Pusat *The subsidi of the central government*	79.862,50	11,55	
	- Asli Daerah *From the region itself*	18.029,65	2,61	
	Jumlah/*Total*	1.382.808,20		

as much as 164,26% at the last year of Pelita III compared with the first year of Pelita III.

In the same period the development expenses originating from the Inpres program since th efirst year till the last year of Pelita III have been improved throughly. This source is only Rp4.611,54 million, then increase of 275,32% or the average o annual increase of 39,19%. Doing so, the amount of development expenses allocation through the Inpres programs during Pelita III is Rp58.618,70 million or 19,53% of the whole allocation of expenses from the government sector. Of this amount 49,68% is used for the purpose of development, the elementary school means; 14,8% for the sustaining of the district roads. Then 14,57% for the rural areas aids, 11,80% for the district aids, while the health means and aids for the market rehabilitation, each is of the amount of 6,85% and 2,22%.

Further for the development growth, the ability of the region increases too in rasing the funds for the expenses of deveelopment projects in the region.

During Pelita III the allocation of development expenses through the regional revenue and budget of the province and district as big as Rp51.704 million or about 17,23% of the whole development fund on government sector. The realization of the regional revenue and budget concerned in the first year of Pelita II as much as Rp5.915,70 million increase from year to year till it reaches Rp13.849,25 million in the last year, which means an increase of 134.849,25 million in the las year, which means an increase of 134,11% or the average per year having the increase of 23,70%. See Table II–2

Tabel / *Table II — 2*

ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN YANG BERASAL DARI
SEKTOR PEMERINTAH SELAMA PELITA III DI MALUKU
ALLOCATION OF DEVELOPMENT EXPENSES ORIGINATING FROM THE
GOVERNMENT SECTOR DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS
(DALAM JUTAAN RUPIAH / *IN RP MILLION*)

No.	Sumber Biaya *The source of funds*	1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983		1983/1984		Jumlah	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%		%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Proyek-proyek/ *Sectoral projects* Sektoral (APBN)/*National Revenue and Budget)*	16.796,21	51,27	25.201,56	54,66	36.300,07	55,98	42.804,40	52,93	44.385,05	58,76	165.487,29	55,14
2.	Program-program Inpres/ *The Inpres Program*	4.611,54	14,08	7.466,62	16,20	11.212,26	17,29	18.020,12	22,28	17.308,16	22,91	58.618,70	19,00
	- Dati II/*of the province*	787,38		1.149,37		1.476,71		1.725,61		1.780,34		6.918,40	
	- S D / *of thedistrict*	2.095,92		3.939,05		5.253,40		9.316,35		8.517,38		29.122,05	
	- Sarana Kesehatan/*health means*	218,71		361,78		813,14		1.198,47		1.425,17		4.017,27	
	- Bantuan Desa/*rural aids*	783,83		1.303,36		1.810,00		2.266,50		2.376,50		8.540,19	
	- Penunjangan Jalan Kabupaten/ *Sustaining the district roads*	725,70		713,10		1.859,01		2.913,20		2.508,77		8.719,78	
	- Pasar *The market*	–		–		–		600,00		700,00		1.300,00	
3.	APBD Dati I *The provincial Revenue and Budget*	4.767,58	14,55	7.949,89	17,24	9.401,29	14,50	10.691,51	13,22	11.422,79	15,12	44.233,06	15,70
4.	APBD Dati II/ *The district Revenue and Budget*	1.145,12	3,50	1.413,91	3,07	1.097,18	1,69	1.386,00	1,72	2.426,46	3,21	7.471,67	.2,40
5.	Lain-lain/ Others	5.437,98	16,60	4.071,41	8,83	6.833,55	10,54	7.964,72	9,85	–	–	24.307,66	8,10
	Jumlah / *Total*	32.761,43	100,00	46.103,39	100,00	64.844,35	100,00	80.866,75	100,00	75.512,16	100,00	300.118,38	100,00

Tabel / *Table II - 3*

PERKEMBANGAN KUMULATIF INVESTASI SEKTOR SWASTA SELAMA PELITA III DI MALUKU (DIPERINCI MENURUT JENIS USAHA) (DALAM JUTAAN RUPIAH)

ACCUMULATIVE DEVELOPMENT OF PRIVATE SECTOR INVESTMENT DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS. (COMPOSED IN DETAILS ACCORDING TO THE TYPES OF ENTERPRISE, — IN RP MILLION(

No	Jenis Usaha *Types of enterprise*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	P M D N *PMDN or Capital Investment*				165.459,75
	- Aneka Industri/ *Multi Industrial sector*	7.861,83	58.562,72	85.018,39	
II	Swasta Lainnya/ *Other private sectors*				100.600,47
	- Aneka Industri (DRO)/ *Multi Industry*	17.076,08	47.380,11	58.681,85	59.865,16
	- Industri Kecil (IK)/ *Small Industry*	6.116,53	7.966,93	26.275,64	34.555,57
	- Industri Logam Dasar (I L D)/ *Basic Metal Industry*	6.179,74	6.179,74	6.179,74	6.179,74
	J u m l a h / *T o t a l*	37.254,18	120.089,50	176.218,62	266.060,22

ekonomi dan umum. Pembangunan tersebut pelaksanaannya bersifat Proyek Nasional yang didukung APBN seperti misalnya dalam pelaksanaan Pelita III (1979/1980 - 1983/1984) mencapai Rp 165.487,29 juta. Lihat Tabel II-4.

Dibandingkan dengan alokasi biaya pembangunan sektoral selama Pelita III, maka selama Pelita IV direncanakan meningkat rata-rata ± 16,74% per tahun dibandingkan dengan peningkatan rata-rata per tahun selama Pelita III sebesar 24,88%.

2. Bantuan Pembangunan Dati I

Sebagaimana ditetapkan bahwa program pembangunan Dati I adalah merupakan program kegiatan pembangunan di daerah yang pembiayaannya didukung dari bantuan pembangunan Dati I (Inpres Dati I) dan pendapatan asli daerah, yang keseluruhan dituangkan dalam APBD Tingkat I propinsi Maluku.

Bantuan pembangunan Dati I bersifat melengkapi yang diperuntukkan menunjang proyek Pelita Pusat. Terdiri dari bantuan yang ditetapkan dan diarahkan guna mencapai keselarasan pembangunan sektoral dan daerah.

Adapun yang menjadi sasaran proyek Dati I adalah untuk meratakan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan kegairahan dan untuk selalu membangkitkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian melalui program ini diharapkan pula taraf hidup masyarakat umum, baik tingkat ekonominya dan sosialnya serta tingkat budayanya dapat lebih ditingkatkan dengan menitikberatkan pada pembangunan daerah-daerah yang dianggap selama ini perlu mendapat perhatian. Lihat Tabel II-5.

Program Inpres dalam pelaksanaannya di Maluku adalah merupakan tugas melengkapi, dengan sasaran untuk lebih mendorong kegiatan Pemerintah di daerah agar mampu melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing menurut bidang dan urusan rumah tangga di daerah yang bersangkutan.

Tujuan program Inpres ini juga diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai manifestasi dari azas pemerataan yang telah menjadi konsensus nasional, yang dituangkan dalam berbagai proyek seperti Proyek pembangunan jalan dan jembatan yang pelaksanaannya melalui proyek padat karya dan lain-lain. Upaya seperti ini dilaksanakan dengan harapan bahwa azas pemerataan tersebut dapat secepatnya terjangkau sampai di daerah-daerah yang sekalipun terpencil.

Program Inpres tersebut terdiri dari: Inpres Dati II, Inpres Sekolah, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Pasar dan Inpres Penunjangan Jalan. Langkah-langkah yang ditempuh sejak Pelita I sampai Pelita IV ini selalu diarahkan kepada:

a. Pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan produksi untuk meningkatkan mutu lingkungan.
b. Membuka daerah-daerah pertanian serta daerah-daerah yang terisolir.
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata di masyarakat pedesaan dan perkotaan yang penduduknya mempunyai

Except the development funds originating from the government sector, to acclerate the economic growth speed, the regional government has done efforts to stimulate domestic private investment on capitals for the development activities.

During Pelita III the private sector has put investment of the amount of Rp266.060,47 million or about 16,995% from the same funds. From this amount a number of Rp35.694.07 million is invested in the forestry industrial sector and Rp29.765.68 million in the fishery industrial sector,while other private investment is comprising multi-industrial sector as much as Rp59.865,16 million, small industrial sector as much as Rp555,57 million and basic metal industrial sector as much as Rp.6.179.74 million. See Table III–3

1. The Sectoral Projects of National Pelita

The Sectoral Projects of National Pelita in the province of Moluccas since the period of Pelita I till Pelita III shows a boosting trend parallel to the development speed itself. The sectoral project concerned are covering the projects on the field of social affairs, economic and general sectors. The realization of the projects concemerd has the national scope sustaine by the National Revenue and Budget just similar to its realization in Pelita III (1979/1980 — 1983/1984) has reached the sum of Rp165.487,29 million. See Table II-4.

Tabel / *Table II — 4*

ALOKASI BIAYA PEMBANGUNAN SEKTORAL MENURUT DIP
1979/1980 - 1983/1984

THE ALLOCATION OF SECTORAL DEVELOPMENT EXPENSES ACCORDING TO LIST OF PROJECTS DRAFT

No.	Tahun *Year*	Anggaran (dalam jutaan rupiah) *Budget (in Rp million)*
1.	1979/1980	Rp 16.796,21
2.	1980/1981	Rp 25.201,56
3.	1981/1982	Rp 36.300,07
4.	1982/1983	Rp 42.804,40
5.	1983/1984	Rp 44.385,05

Sumber : PEMDA Propinsi Maluku.
Source : The Regional Government of the Province of Molucas.

Compared with the allocation of sectoral development expenses during Pelita III, during Pelita IV it planned to increase the average of about 16,74% per year compared with the increase of annual average during Pelita III as big as 24,88%.

2. Development Aids for the Provincial Region

As it is already stipulated that the development program of the provincial region is a program of development activities in the region of which the expenses are supported by the development aids to the provincial region (Inpres for the provincial region) and the income of the region itself, which is on the whole laid down in the Regional Revenue and Budget of the Province of the Moluccas.

The development aids are of the accomplishing characters in sustaining the central projects on Pelita, comprising the aids determined and aimed to reache the harmony between the sectoral development and the regional develpment.

The objectives of the provincial project is to achieve equitable distribution of the results of the development, to enhance the spirit and participation of the society. Doing so through this program it is expted that the living standard of the public, either its economic and social aspects, or it cultural aspect, can be more enhanced by emphasizing on the regional developments which up till now are considered to be necessary to get attention for. See Table II–5

The Inpres Program in its realization in the Moluccas is a complementary task, with the objectives to stimulate the government activities in the region in order to be able to realize the development in each region according with the fields and domestic affairs in the regions concerned.

The aim of this Inpres program is also expected to create employment opportunities as the manifestation of the quitable principle of distribution which has been accepted as the national concensus, laid down in various projects such as the project of roads and bridges construction, of which the realization is done by the solid work project, and others. Such and effort is carried out with the hope that the principle of equitable distribution can be achieved as soon as possible to the regions even in the remote places.

The Inpres Program concerned is consisting of : Inpres Program of the district, Inpres Program for the schools, Inpress Program for the elementary

Tabel / *Table II — 5*

JUMLAH INVESTASI PROGRAM BANTUAN INPRES DATI I PROPINSI MALUKU TAHUN 1979/80 - 1983/84
THE AMOUNT OF INVESTMENT ON INPRES PROGRAM AID FOR THE PROVINCE OF THE MOLUCCAS 1979/1980 — 1983/1984

No Dati II *District*	Jumlah Proyek *Projects*	Jumlah Dana *Funds*
1. Maluku Utara/*North Moluccas*	53	Rp 1.835.477.000,-
2. Maluku Tengah/*Central Moluccas*	60	Rp 2.268.102.000,-
3. Maluku Tenggara/*Southeast Moluccas*	48	Rp 1.249.947.000,-
4. Kotamadya Ambon/*The Municipality of Ambon*	55	Rp 948.436.000,-
5. Halmahera Tengah/*Central Halmahera*	33	Rp 611.438.000,-
Jumlah *Total*		Rp 6.913.400.000,-

penghasilan yang rendah.
d. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui bersih, sanitasi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
e. Membangun Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta.
f. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan perekonomian yang lancar melalui prasarana pasar yang memadai.

Dengan langkah-langkah yang terus menerus diarahkan, diharapkan secara bertahap akan dapat dicapai suatu tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan dan di perkotaan seperti sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:
a. Menciptakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja.
b. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
c. Memperbaiki lingkungan hidup masyarakat.
d. Memperlancar hasil produksi pertanian rakyat.
e. Melalui Inpres Kesehatan diusahakan untuk pembangunan PUSKESMAS dan penyediaan obat-obatan di daerah kecamatan dan daerah yang terpencil termasuk didalamnya penyediaan dokter dan obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya.
f. Pembangunan sarana perekonomian seperti pasar-pasar dan sarana perekonomian desa lainnya.

3. Program Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II

Pelaksanaan program pembangunan Daerah Tingkat II di Propinsi Maluku sejak Pelita I telah banyak membawa kemajuan dan manfaat langsung kepada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Adapun penyerapan dana yang bersumber dari program Bantuan Inpres Dati II sejak Pelita I tahun 1970/1971 sampai dengan Pelita IV tahun ketiga 1986/1987 sebesar Rp 15.916.271.000,-

Dana tadi dimanfaatkan untuk membiayai berbagai jenis kegiatan pembangunan seperti:

- Peningkatan jalan tanah ke jalan aspal sepanjang 343,745 Km.
- Rehabilitasi jalan beraspal sepanjang 294,408 Km.
- Pemeliharaan jalan beraspal sepanjang 111,559 Km.
- Rehabilitasi jalan tidak beraspal sepanjang 30 Km.
- Pembuatan baru jalan tanah/tidak beraspal sepanjang 74,92 Km.
- Pemeliharaan jalan tidak beraspal 8 Km.
- Rehabilitasi jalan darat + laut sepanjang 849 m.
- Pembuatan jembatan darat + laut 189 m
- Rehabilitasi Irigasi 3.335 m
- Pembuatan baru irigasi dan lain-lain 8.998 m.
- Pembuatan pasar seluas 11.785,85 M (34 unit)
- Pembuatan riool dan got sepanjang 35.157 m
- Pembuatan Talud dan tembok, penahan ombak 13.280 m.
- Pembangunan stasiun bis seluas (5 lokal/unit). 13.000 M²
- Pembuatan Duiker sebanyak 133 buah

Serta pengadaan ternak dan fasilitas kandangnya. Lihat Tabel II-6.

4. Bantuan (Inpres) Desa

Kegiatan yang dilaksanakan menyangkut Inpres Bantuan Pembangunan Desa, dikaitkan dengan swadaya gotong royong masyarakat yang diarahkan untuk pembangunan prasarana sebagai berikut:
a. Prasarana produksi meliputi: pertanian, penghijauan dan lain-lain.
b. Prasarana perhubungan meliputi: pembangunan jembatan jalan pengadaan motor laut.
c. Prasarana pemasaran meliputi: pembangunan pasar dan gudang desa.

schools, Inpres Program for the market, and Inpres Program for the roads betterment.

The steps taken since Pelita I till Pelita IV are always aimed :

a. Development of project on communication infrastructure and production to enhance the environment standard.
b. To open agricultural areas and isolated areas.
c. To accelerate the health service on equitable distribution in the rural and urband society, of which the population are of low incomes.
e. To build uip elementary school buildings, the religious Moeslem elementary school, either governmental or private.
f. To increase the public income by the fluent economy by the adequate market infrastructure.

With the steps continually airmed,it is expected to be phase by phase, able to be achieved a level of social welfare in the rural and urban areas, as the objectives stipulated as follows :

a. To create and extensify the fields ofemployment and job opportunities.
b. To increase the public income.
c. To improve the social living environment.
d. To make fluent production of the people's agriculture.
e. By the Inpres Program on health efforts are done build up a public health centre and the supply of medicine in the subdistricts and the remoted places, include init the supply of doctors and mediciene, and other health means.
f. The development of economic infrastructure like the markets, and other rural economic means.

3. Inpres Program for the District Development

The realization of the development program of the districts in the province of Moluccas since Pelita I has brought forth much improvement and direct benefit to the society, either in the rural or in the urban areas.

The funds absorption of which the sourch is the Inpres Program aid for the district area since Pelita I the year 1970/1971 till Pelita IV the third year (1986/1987) as big as Rp15.916.271.000. This fund is utilized to pay the cost of verious development activities such as :

- *To enhance the land road into an asphalt road as long as 347,743 km.*
- *The rehabilitation of asphalt roads as long as 294,408 km.*
- *The maintenance of asphalt road as long as 111, 559 km.*
- *The rehabilitation of roads without asphalt as long as 30 km.*
- *Construction of new land road/without asphalt as long as 74,92 km.*
- *The maintenance of non-asplhalt road as long as 8 km.*
- *The rehabilitation of land and sea ways as long as 849 km.*
- *The construction of land and sea ways, 189 km.*
- *The rehabilitation of irrigation as long as 3.335 m.*
- *The construction of new irrigation and the like as long as 8.998 m.*
- *The construction of markets as broad as 11.785,85 m2. (34 units)*
- *The construction of spillways and ditches as long as 35.157 m.*
- *The construction of dunes and walls, to resist the waves as long as 13.280 m.*
- *The denstruction of bus stations as broad as 13.000 m2. (5 localiteis, 5 units)*
- *The construction of "duicker" as many as 133 units, and the supply of cattle and the stables. See Table II-6*

Tabel / *Table II — 6*

ALOKASI DANA PROGRAM INPRES DATI II SEJAK PELITA I TAHUN 1970/1971 — 1986/1987 di PROPINSI DATI I MALUKU
THE ALLOCATION OF INPRES PROGRAM FUNDS OF THE DISTRICTS SINCE PELITA I THE YEAR 1970/1971 — 1986/1987 IN THE PROVINCE OF THE MOLUCCAS

No	Tahun *Year*	Jumlah Dana *The amount of funds*
1	1970/1971 - 1973/1974	388.241.072, (PELITA I)
2	1974/1975 - 1978/1979	2.613.585.000,-(PELITA II)
3	1979/1980 - 1983/1984	6.914.353.000,-(PELITA III)
4	1984/1985 - 1986/1987	6.000.122.000,-(PELITA IV)
	Jumlah / *Total*	15.916.271.000,-

Sumber Pemda Dati I Maluku
Source : The Provincial Government of the Moluccas.

4. Inpres Aid for the Rural Areas.

Activities done in connection with Inpres Aid for the rural areas, in relationship with the mutual assistance and self-initials efforts of the society aimed to various development infrastructure :

a. Infrasctructure of production covering agriculture, regreening etc.
b. Infrastructure of communication covering : bridges construction, roads,

d. Prasarana sosial meliputi: pembangunan tempat ibadah, balai desa, air bersih, WC dan lain-lain.

Dalam Pelita III (Tahun anggaran 1978/1979 sampai dengan 1983/1984) melalui Inpres Bantuan Pembangunan Desa untuk Propinsi Dati I Maluku telah dialokasikan dana sebesar Rp 8.540.190.000,- yang akan direalisirkan sesuai Daftar Usulan Rencana Desa untuk membiayai proyek-proyek prasarana desa dari tahun pertama Pelita III sampai dengan tahun keempat sebesar Rp 6.151.670.000,-.

Sisa sebesar Rp 1.760.000,- bantuan pemerintah daerah Rp 5.879.550,- dan swadaya masyarakat Rp 2.999.541.170,- telah berhasil membangun 4.540 buah yang terdiri dari:

(1) Prasarana produksi	:	1.241 buah
(2) Prasarana perhubungan	:	810 buah
(3) Prasarana pemasaran	:	28 buah
(4) Prasarana sosial	:	2.461 buah

Sedangkan pada Pelita II jumlah biaya yang dialokasikan sebesar Rp 7.521.307.024,- terdiri dari swadaya masyarakat Rp 5.452.157.024,- dan bantuan pemerintah pusat Rp 2.069.150.000,- jumlah proyek fisik yang dibangun berjumlah 7.302 buah terdiri dari:

(1) Proyek prasarana produksi	:	556 buah
(2) Proyek prasarana perhubungan	:	1.453 buah
(3) Proyek prasarana pemasaran	:	77 buah
(4) Proyek prasarana sosial	:	5.226 buah

Dari dana tadi tampak beberapa jenis produksi yang akan dibangun dalam 2 (dua) Pelita tersebut bervariasi yaitu pada Pelita II proyek prasarana sosial mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Pelita III dan proyek prasarana produksi pada Pelita II lebih kecil dari Pelita III.

Jumlah dana yang diinvestasikan juga terdapat perbedaan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun swadaya masyarakat. Terdapatnya perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan penggunaan bantuan pembangunan desa lebih banyak ke pembangunan proyek prasarana produksi untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat dari kepentingan akan prasarana sosial (tempat ibadah) pada Pelita III. Hal ini mungkin karena pada Pelita II hampir semua desa telah memanfaatkan bantuan tersebut untuk membangun prasarana sosial (tempat ibadah) dan lain-lain.

Menurunnya swadaya masyarakat pada Pelita III mungkin disebabkan oleh banyaknya proyek pemerintah yang pelaksanaannya dikaitkan swadaya masyarakat.

Dimulai tahun anggaran 1982/1983 telah dilakukan pemugaran perumahan rakyat desa melalui paket proyek UDKP di 3 (tiga) Kecamatan meliputi 5 (lima) desa, dengan biaya Rp 5.000.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp 3.250.000,-.

Jumlah kepala keluarga yang mendapat pemugaran tempat tinggal 60 KK.

Dalam upaya menata kembali desa akan bangunan fisik dan lingkungannya menjadi baik dan memenuhi syarat hidup sehat, maka kegiatan pemugaran perlu lebih digalakkan/ditingkatkan diwaktu mendatang.

5. Program Inpres Sekolah Dasar

Pelaksanaan Program Inpres Pembangunan Sekolah Dasar (SD) dimaksudkan sebagai upaya untuk perluasan dan pemerataan kesempatan di sektor pendidikan. Sasarannya adalah untuk menampung anak-anak usia sekolah 7 - 12 tahun yang tidak tertampung pada sekolah-sekolah dasar yang sudah ada. Untuk itulah lokasi pembangunan gedung sekolah ini diutamakan di daerah pedesaan serta di daerah perkotaan yang masyarakatnya berpenghasilan rendah.

Bantuan dana melalui Inpres ini ditujukan untuk pembangunan SD baru, gedung SD bertingkat, penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan rumah dinas Kepala Sekolah, rumah penjaga sekolah, rumah guru, rehabilitasi total Sekolah Dasar Negeri dan swasta, rehabilitasi ringan SD Negeri dan SD swasta. madrasah Ibtidaiyah.

Dalam rentetan menunjang proses belajar dan mengajar khususnya pada taraf tingkat pendidikan dasar dan sederajat dengan itu sejak Pelita I tepatnya mulai tahun 1973/1974 di Propinsi Maluku telah ditetapkan Program Inpres SD sebagai langkah awal dalam menunjang proses belajar. Dalam menelusuri perjalanannya mulai dari pencetusannya tahun 1973/1974 sampai Pelita IV tahun ke—3, 1986/1987 tercatat telah menghabiskan investasi sebesar Rp 60.702.770.000,- dengan menghabiskan sejumlah dana tersebut diperoleh beberapa hasil seperti.

- Pembangunan baru unit I sebanyak 998 unit
- Pembangunan baru unit II sebanyak 400 unit.
- Pembangunan gedung bertingkat sebanyak 35 unit.
- Tambahan ruang kelas sebanyak 1.733 buah
- Penyediaan fasilitas air bersih sebanyak 812 buah
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah sebanyak 1.297 buah.

and supply of motorboats.

c. *Infrastructure of marketing covering construction of markets and rural storehouses.*

d. *Infrastructure of social affairs covering construction of prays house, village meeting halls, fresh water, water closets etc.*

In Pelita III (the fiscal year 1978/1979 till 1983/1984) through the Inpres Aid for Rural Development for the province of the Moluccas, an amount of funds has been allocated as big as Rp8.540.190.000 which should be realized in accord with the listh of proposals on the village planning program to pay the cost of the infrasctructural project for the rural areas from the first year Pelita III till the fourth year of Pelita III as big as Rp6.151.670.000.

The remnant of Rp1.760.000 from the regional government's aid Rp5.879.550 and the self-initiatives of the society as big as Rp2.999.541.170, has succeeded in building up 4.540 units, consisting of :

(1) Infrastructure of production : 1.241 units
(2) Infrastructure of communication : 810 units
(3) Infrastructure of marketing : 28 units
(4) Infrastructure of social affairs : 2.461 units.

In Pelita II the amount of expense allocated is a big as Rp7.521.307.024 consisting of society' self-innitiatives as big as Rp5.452.157.024 and the aid from the cenral government Rp2.069.150.000, the number of physical projects being built up as many as 7.302 units, comprising :

(1) Project on production infrastructure : 556 units.
(2) Project on communication infrastructure : 1.453 units.
(3) Project on marketing infrastrucure : 77 units
(4) Project on social infrastructure : 5.226 units.

From the funds mentioned above, we can see how the types of projects to be built up in those two Pelita are variable namely in Peltia II the project on social infrastructure undergoes an increase if compared to the Pelita III, and the project on production infrastructure in Pelita II is smalleer than PelitaII.

The sum of funds being invested also show differences, either originating from the central government or from the self-initiatives of the society. The existence of the difference mentioned above, among others is caused by the existence of tendency to use the rural aid more oriented to the production infrastructure in order to enhance the society's earnings from the interest of the social infrastructure (prayer houses) in Pelita III. This fact in made possible because in Pelita II nearly all villages have taken advantages of the aid concerned to build up social infrastructure (prayer houses), etc.

The decline of the self-initiatives of the society in Pelita III might be caused due to the many projects of the government of which the realization is affiliated to the self-initiatives of the sociaty.

Beginning with the fiscal year 1982/1983 rehabilitation of public housings has been done via the package of project on the development working areal units in three sub-districts covering five villages with the expenses of Rp5.000.000, and the self-initiatives of the society as big as Rp.3.250.000.

The number of families attaining the settlemen rehabilittion as many as 60 faimilies.

In the attempts to rearange the rural areas concerning the physical construction and its living environment for a better inprovement and fulfilling the requirements for a healthy way of live, the rehabilitation activities shoud be more accelerated/increased in the future.

5. *The Inpres Program for Elementary Schools*

The realization of the program of the Inpres development on elementary schools is aimed to do efforts to extensify and equitable opportunities in the educational sector. The objective is to accomodate the childres of the school-going compulsory age from 7 - 12 years, which are not having vacancies in the elementary schools in existence. For that reason the location of the building up of the school should be put priorities in the rural areas and in the urban areas of which the population are of the lower income.

The funds aid through this Inpres program is aidme to build up elementary schools, storeyed elementary school buildings, supply of fresh water facilities, construction of officieal residence of the headmaster, the home of the school guard, the houses for the teachers, total rehabilitation of governmental and privates schools, Moslem religious elementary schools,.

Within the frame of sustaining the process of learning and teaching, especially on the level of basic education and its similar level, by that since Pelita I, exactly since 1973/1974 in the province of Moluccas, has been decided the program of Inpres for the elementary school as the first initial step in supporting the learning process. In traching back the process, beginning with its appearance in the year 1973 / 1974 till the Pelita IV the third year (1986/1987) it is noted to have used a number of investment of

- Pembangunan ruang penjaga sekolah sebanyak 756 buah.
- Pembangunan rumah guru sebanyak 3.019 buah.
- Rehabilitasi total SD Negeri sebanyak 111 buah.
- Rehabilitasi total SD Swasta sebanyak 111 buah
- Rehabilitasi ringan SD Negeri sebanyak 1.600 lokal.
- Rehabilitasi ringan SD Swasta sebanyak 2.077 lokal.
- Rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 374 lokal.
- Rehabilitasi berat SD Negeri sebanyak 851 unit.
- Rehabilitasi berat SD Swasta sebanyak 300 unit dan
- Rehabilitasi berat Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 58 unit. Lihat Tabel II-7.

Tabel / *Table II - 7*

ALOKASI DANA INPRES SD DI MALUKU 1973/1974 — 1986/1987
ALLOCATION OF INPRES AID FOR ELEMENTARY SCHOOL IN THE MOLUCCAS 1973/1974 — 1986/1987

No	Tahun *Year*	Jumlah Anggaran *Amount of budget*
1.	Tahun terakhir Pelita I/ *The last year of Pelita I*	Rp 192.500.000,-
2.	1974/1975 - 1978/1979	Rp 3.120.265.000,-
3.	1979/1980 - 1983/1984	Rp 28.696.102.000,-
3.	1984/1985 - 1986/1987	Rp 37.681.520.414,-
	Jumlah / *Total*	Rp69.702.770.000,-

Sumber : *Pemda Dati I Propinsi Maluku*
Source : The Provincial Government of the Moluccas.

6. Program Inpres Sarana Kesehatan

Program Inpres sarana kesehatan ini ditujukan ke pedesaan dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan yang merata. Bantuan seperti ini ditujukan untuk membangun PUSKESMAS, Rehabilitasi PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, Perbaikan PUSKESMAS, pengadaan PUSKESMAS Keliling, pembangunan rumah para medis, rumah dokter dan termasuk rumah dokter dan medis.

Sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata dan terpadu pihak pemerintah sejak Pelita II tahun 1974/1975 sampai Pelita IV tahun 1986/1987, telah mencanangkan pembiayaan khusus guna membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan yang pada akhirnya akan berperan sebagai prasarana maupun sarana penunjang pemerataan pelayanan kesehatan tersebut.

Melalui program Inpres Kesehatan Pemda Maluku berhasil membangun berbagai kegiatan maupun fasilitas sampai dengan tahun 1986/1987. Program Inpres Kesehatan ini telah menyerap dana sebesar 9.783.288.922,-.

Dari jumlah dana tadi berhasil dibangun berbagai kegiatan maupun fasilitas yang tersebar di seluruh pelosok Dati II Propinsi Maluku sebagai usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan antara lain sebagai berikut:

- Pembangunan Puskesmas baru sebanyak 65 buah gedung.
- Rehab Puskesmas sebanyak 138 gedung.
- Perluasan Puskesmas sebanyak 29 buah.
- Pembangunan baru Puskesmas pembantu sebanyak 320 buah.
- Perbaikan Puskesmas sebanyak 53 buah.
- Peningkatan Puskesmas Pembantu sebanyak 41 buah.
- Pengadaan Puskesmas keliling sebanyak 22 buah (kendaraan).
- Pembangunan rumah para medis sebanyak 50 buah.
- Pembangunan rumah dokter sebanyak 56 buah.
- Perbaikan rumah dokter dan para medis sebanyak 75 buah dan pengadaan sepeda, sepeda motor dan sarana air minum serta pembangunan jamban keluarga sebanyak 8.584 buah. Lihat Tabel II-8.

7. Program Inpres Pembangunan dan Pemugaran Pasar

Pelaksanaan Program Inpres Pembangunan dan Pemugaran pasar di Maluku dimulai tahun kedua Pelita II (1976/1977) sampai dengan Pelita III, seterusnya dalam Pelita IV Propinsi Maluku tidak memperoleh dana lagi. Pada prinsipnya program ini ditujukan kepada daerah-daerah perkotaan yang sangat mendesak keperluannya akan prasarana pasar. Dalam merealisasikan program ini dasar kebijaksanaan yang dijadikan patokan oleh pemerintah pusat adalah faktor-faktor seperti: 1) Sangat urgen untuk keperluan pengadaan ruangan pasar bagi para pedagang ekonomi lemah; 2) Untuk perluasan kota, dan 3) Untuk mencegah kepadatan pertumbuhan penduduk pada suatu tempat tertentu.

Investasi Inpres Pasar ini adalah bersifat kredit tanpa bunga yang dalam waktu jangka waktu tertentu harus dikembalikan kepada

Rp60.702.770.000. By using up such a great fund there are some results gained such as :

- *New constructions of Unit I as many as 998 units.*
- *New construction of Unit II as many as 400 units.*
- *Construction of storeyed buildings as many as 35 units.*
- *Additional class rooms as many as 1.733 units.*
- *Construction of official residence of the headmaster as many as 1.297 units.*
- *Construction of school guards homes as many 756 units.*
- *Construction of teachers fousings as many as 3.019 units.*
- *Total rehabilitation of elementary school buildings owned by the government as many as 111 units.*
- *Total rehabilitation of elementary school buildings owned by private institutions as many as 111 units.*
- *Light rehabilitation of elementary school buildings owned by the government as many as 1.6000 rooms.*
- *Light rehabilitation of elementary school buildings owned by the private institutions as many as 2.077 rooms.*
- *Rehabilitation of Moslem religious elementary school buildings as many as 374 rooms.*
- *Heavy rehabilitation of elementary school buildings owned by the government as many as 851 units.*
- *Hevy rehabilitation of elementary schools owned by the private institution as many as 300 units.*
- *Heavy rehabilitation of Moslem religious elementary school buildings as many as 58 units. See Table II – 7.*

6. *Inpres Program on Health Infrastructures.*

The Inpres Program on Health Infrastructures is destined to the rural areas with the intention to increase the equitable distribution of service. This aid is intended to buil up public health centres, rehabilitation of public health centres, auxiliary public health centres, auxiliary public health centres, improvement of public health centres, supply of mobile public health centres, construction of para medical housings, the doctor's residence.

As one of the efforts in the fulfilling of the public health service by way of equitable distribution and well-integrated, the central government since Pelita II year 1974/1975 till Pelita IV the year 1986/1987 has designed a special cost to pay the activities on the development which is finally would be playing the role of infrastructure or means to support the equitable service on health concerned.

By the Inpres Program on Health the regional government has succeeded in developing various activities or facilities till the year 1986/1987. This Inpres program on health has absorbed a fund of Rp9.783.288.922.

From this fund many activities ad facilities have been realized, which are scattered throughout the subdistrict regions of the whole province of Moluccas as the attemts to boost the health standard among others as follows :

- *Construction of new public health centre as many as 65 buildings.*
- *Rehabilitation of public health centres as 138 buildings.*
- *Extensification of public health centres as many as 29 units.*
- *Construction of 320 auxiliary public health centres.*
- *Improvement of public health centres as many 53 units.*
- *Improvement of auxiliary public health centres 41 units.*
- *Supply of mobile public health centre 22 units (vehicles).*
- *Building up houses for the paramedical manpower 50 units.*
- *Bulding up houses for doctors 56 units.*
- *Rehabilitation of houses for doctors and paramedical manpower as many 75 units, and supply of bycicles, motorcycles, fresh water means, and family water closets, as many as 8.584 units.*
  See Table II-8.

Tabel / *Table II — 8*

ALOKASI DANA INPRES SARANA KESEHATAN DI MALUKU SELAMA PELITA II s/d PELITA IV
ALLOCATION OF INPRES FUNDS FOR HEALTH INFRASTRUCTURE IN THE MOLUCCAS AS LONG AS PELITA III TILL PELITA IV

No	Tahun / *Year*	Jumlah Dana/*Amount of funds*
1	1974/1975 - 1978/1979	Rp 884.912.000,-
2	1979/1980 - 1983/1984	Rp4.016.417.000,-
3	1984/1985 - 1986/1987	Rp4.881.905.992,-
	Jumlah / *Total*	Rp9.783.288.992,-

Sumber : *Pemda Dati I Propinsi Maluku*
Source : The Provincial Government of the Moluccas.

Pemerintah Pusat. Di Propinsi Maluku sejak memperoleh dana ini tahun 1976/1977 sampai dengan tahun 1983/1984 telah diserap dana sebesar Rp 2.130.000.000,-. Dana sebanyak ini telah dipakai untuk membangun pasar-pasar seluas 19.562,3 M² yang berlokasi tersebar di lima Dati II Maluku.

Tabel / *Table II - 9*

ALOKASI DANA INPRES PASAR DI MALUKU SELAMA PELITA II 1974/1975 - 1983/1984

ALLOCATION OF INPRES FUNDS FOR THE MARKET IN THE MOLUCCAS DURING PELITA II 1974/1975

No	Tahun / *Year*	Jumlah Dana / *Amount of fund*
1.	1976/1977 - 1978/1979	Rp 750.000.000,-
2.	1979/1980 - 1983/1984	Rp1.380.000.000,-
	Jumlah / *Total*	Rp2.130.000.000,-

Sumber : Pemda Dati I Propinsi Maluku
Source : The Provincial Government of Moluccas.

8. Program Inpres Bantuan Penunjangan Jalan

Sasaran dari pelaksanaan program Inpres Bantuan Penunjangan jalan dan jembatan adalah untuk membuka jalan-jalan baru dan jembatan untuk mencapai dan menunjang daerah yang potensial dan terisolir. Sejak terbentuknya program ini di Propinsi Maluku yakni dalam kurun waktu Pelita III tahun 1979/1980 sampai dengan Pelita IV tahun ke III 1986/1987 bagi Propinsi Maluku telah menyerap dana Rp 15.964.776.000,-, dimana dari dana tadi berhasil dikerjakan beberapa kegiatan antara lain:
- Pembangunan jalan baru sepanjang 2.035,365 Km
- Peningkatan jalan tanah ke jalan aspal sepanjang 58,99 Km
- Pembangunan jembatan baru sepanjang 5.213 M.
- Kelengkapan jalan berupa gorong-gorong sepanjang 1.060 M.
- dan lain-lain. Lihat Tabel II-10.

Tabel / *Table II — 10*

ALOKASI DANA INPRES PENUNJANGAN JALAN/JEMBATAN DI MALUKU 1979/1980 - 1986/1987

ALLOCATION OF INPRES FUNDS FOR THE SUPPORT OF ROADS AND BRIDGES IN THE MOLUCCAS 1979/1980 — 1986/1987

No	Tahun / *Year*	Jumlah Dana / *Amount of fund*
1.	1979/1980 - 1983/1984	Rp8.719.776.000,-
2.	1984/1985 - 1986/1987	Rp7.245.000.000,-
	Jumlah / *Total*	Rp15.964.776.000,-

Sumber : Pemda Dati I Propinsi Maluku
Source : The provincial government of the Moluccas.

9. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC)

Sumber pembiayaan Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC) merupakan bantuan Dati I kepada Dati II, dalam upaya membantu Dati II menggalakkan pembangunan di wilayahnya.

Sejak Pelita I sampai dengan Pelita IV tahun ketiga 1986/1987 dana APBD Tingkat I Maluku maupun Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh kepada Dati II yang telah diserap untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah Tingkat I Maluku adalah sebesar Rp 98.884.409.531,- Dari jumlah tersebut dimanfaatkan untuk membiayai 2.371 buah proyek pada berbagai sektor dan sub sektor. Lihat Tabel II-11 dan II-12.

10. Pembangunan Desa

Propinsi Daerah Tingkat I Maluku sebagai daerah Seribu Pulau dengan penduduk tahun 1983, ± 1.439.000 jiwa dan sebagian besar (80%) berada di pedesaan serta tersebar pada 1.717 desa/kelurahan.

Dari jumlah desa/kelurahan yang disebutkan tadi termasuk desa/kelurahan yang mengalami penggantian/peralihan nama/status desa menjadi kelurahan, dan pemekaran dari lingkungan maupun desa menjadi kelurahan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri masing-masing No 140—135 tanggal 14 Pebruari 1981. Dengan Surat Keputusan tersebut, maka jumlah nominatif desa/kelurahan di Propinsi Maluku menjadi 1.717. Lihat Tabel II-12a.

7. The Inpres Program for the Development and Restoration of Market

The realization of the Inpres Program on development and restoration of the market in the Moluccas has begun in the second year of Pelita II (1976/1977) till Pelita III, further in Pelita IV the government of the province of Moluccas does not get any fund more. Principally this program is intended to the urban areas which are in urgent necessities for market infrastructure. In the realization of this program the basic policy which is made as standard by the central government is the factors such as :

(1) very urgent for the needs of market locality supply for the puny economic traders ;
(2) for the extiensification of towns, and
(3) for the purpose of thwarting the population density growth in certain place.

Investment for this Market Inpres is in the form of credits without interest, which is within a certain period of time should be returned to the central government. In the province of Moluccas since it gets the fund in the year 1976/1977 till the year 1983/1984 a number of funds have been absorbed of Rp2.130.000.000, — Such a big fund has been used for building up markets as wide as 19.562,3 m2, of which the location is scattered in five districts of the Moluccas. See Table II-9.

8. Inpres Program Aid on Roads Support

The objectives of the realization of the Inpres Program Aid on roads and bridges are to open new roads and bridges to achieve and support potential regions which are isolated. Since the forming of this program, in the province of the Moluccas, namely in the period of Pelita III 1979/1980 — Pelita IV the third year (1986/1987), the province of the Moluccas has absorbed a fund of Rp 15.964.776.000 of which fund a number of activities have been successfull carried out, among others :

- *Construction of new roads as long as 2.035,265 km.*
- *Acceleration of land roads into asphalt roads as long as 58,99 km.*
- *Constructionof new bridges as long as 5.213 m.*
- *Supplementary elements for the roads in the form of ditches, as long as 1.060 m.*
- *And others. See Table II-10.*

9. Aid for the Rehabilitation of Cloves

The source of the aid for rehabilitation of cloves is the aid from the province to the districts, in the efforts to help the districts to accelerate the development in this region.

Since Pelita I till Pelita IV the third year (1986/1987) the regional revenues and budget of the province of Moluccas and the aid for the rehabilitation of cloves for the districts, which are already absorbed for the realization of activities on the development in the province of Moluccas, is as much as Rp98.884.409.531. From this sum of fund a part has been used for the expenses of 2.371 projects in various sectors and sub-sectors. See Tables II-11 and II-12.

Tabel / *Table II — 11*

ALOKASI BANTUAN SUMBANGAN REHABILITASI CENGKEH KEPADA DAERAH TINGKAT DATI II SE MALUKU I — IV (1970/1971 - 1986/1987)

ALLOCATION OF AID FOR REHABILITATION OF CLOVES TO THE DISTRICTS IN THE MOLUCCAS PELITA I TILL PELITA IV (1970/1971 — 1986/1987)

No	Tahun / *Year*	Jumlah Dana / *Amount of fund*
1.	1970/1971 - 1973/1974	452.625.000,-
2.	1974/1975 - 1978/1979	974.500.000,-
3.	1979/1980 - 1983/1984	3.785.000.000,-
4.	1984/1985 - 1986/1987	3.225.000.000,-

Sumber : Pemda Dati I Maluku.
Source : The Provincial Government of Moluccas.

Tabel / *Table II — 12*

ALOKASI APBD TINGKAT I MALUKU PELITA I — IV (1970/1971 - 1986/1987)

THE ALLOCATION OF THE REGIONAL REVENUES AND BUDGET OF THE PROVINCE OF MOLUCCAS PELITA I TILL PELITA IV (1970/1971 — 1986/1987)

No	Tahun / *Year*	Jumlah Dana / *Amount of fund*
1.	1970/1971 - 1973/1974	3.478.746.530,-
2.	1974/1975 - 1978/1979	9.470.270.000,-
3.	1979/1980 - 1983/1984	40.408.225.000,-
4.	1984/1985 - 1986/1987	37.108.143.000,-

Sumber : Pemda Dati I Maluku
Source : The Provincial Government of Moluccas.

Tabel / *Table II — 12a*

JUMLAH NOMINATIF DESA DAN KELURAHAN DI PROPINSI MALUKU DIPERINCI MENURUT DAERAH TINGKAT II

THE AMOUNT OF NOMINATIVES OF VILLAGES AND VILLAGES PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PROVINCE OF MOLUCCAS IN DETAILS ACCORDING TO THE DISTRICTS

No Kabupaten/Kodya *District/Municipality*	Desa *Villages*	Kelurahan *Public Administration*	Jumlah *Total*
(1) (2)	(3)	(4)	(5)
1. Kotamadya Ambon/ *The Municipality of Ambon*	24	16	40
2. Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	453	6	459
3. Maluku Utara/ *North Moluccas*	566	23	589
4. Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	519	8	527
5. Daerah Administratif Halmahera Tengah/ *The Administrative District of Halmahera*	82	20	102
Jumlah / *Total*	1.644	73	1.717

Dari 1.717 desa yang ditetapkan/dikukuhkan dengan Surat **Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut baru 1.694 desa** berhak memperoleh uang Bantuan Pembangunan Desa melalui program Inpres Bantuan Pembangunan Desa setiap tahun. Yang belum memperoleh Bantuan Desa sebanyak 23 desa/kelurahan.

Pada umumnya desa/kelurahan tersebut merupakan desa pantai **atau dengan kata lain terletak di pesisir pantai, kecuali** beberapa desa **di Pulau Seram. Disamping itu penduduknya sebagian besar** terkonsentrasi di Pulau-pulau kecil seperti Saparua, Haruku, Ambon, Ternate, **dengan potensi alamnya sangat terbatas.**

Keadaan desa-desa ini pada **dasarnya berbeda satu** sama lain baik **mengenai jumlah penduduk, struktur Pemerintah Desa,** potensi alam, **tingkat pendapatan, kesejahteraan masyarakat,** pendidikan, adat istiadat **serta tata lingkungannya.**

Angkatan kerja semakin meningkat, khususnya di pulau-pulau kecil, **seperti: Saparua, Haruku, Ternate, Ambon,** Kei Kecil dengan perkem**bangan penduduk yang sangat pesat dan** potensi alamnya relatif sangat **terbatas dan tata lingkungan hidup sangat** terancam. Di desa-desa **angkatan kerja yang tersedia sangat terbatas,** kemampuan untuk **menggali dan mengembangkan** lingkungan hidup serta kurangnya **ketrampilan yang dimiliki dan belum memadai keadaan sarana dan prasarana.**

Disamping itu di pedalaman beberapa pulau besar seperti Pulau Seram, Buru, Halmahera dan Pulau Taliabu masih terdapat suku-suku terasing yang sebagian besar belum dapat dimukimkan ke daerah-daerah yang memadai guna membentuk suatu tata kehidupan dan **lingkungan yang baik.**

Oleh karenanya berdasarkan kondisi tadi dan sesuai **hakekat pembangunan, maka masalah Pembangunan Desa perlu mendapat perhatian** dan prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan selama sepuluh tahun terakhir, pembangunan pedesaan telah berjalan **dengan baik. Ditangani secara terarah** dan intensif meliputi berbagai aspek **kehidupan masyarakat pedesaan** dengan tujuan untuk meningkatkan **perkembangan dan pertumbuhan** desa-desa Swadaya ke desa **Swakarya** menuju **desa** Swasembada.

Target Nasional pencapaian Desa **Swasembada (Pelita III) sebesar** 4% per tahun dengan perkiraan bahwa pada **tahun 2.000, seluruh desa** telah menjadi desa Swasembada. **Dengan meningkatnya jumlah desa** akibat pemekaran desa dan pembentukan **desa baru, maka target** perkembangan desa **Swasembada selama Repelita IV ditingkatkan** menjadi 7% setiap tahun (target **Nasional**).

Hasil yang dicapai setiap tahun **selama Pelita III di Propinsi Maluku** sebesar 1,3% yang berarti **masih jauh** dibawah target **Nasional. Untuk** mempercepat **pencapaian desa Swasembada berbagai upaya telah** dilakukan **melalui sistem UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan)** sebagai suatu sistem **perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dengan** Wilayah **sebesar satu kecamatan, penyelenggaraan** Perlombaan **desa (KPD), PKK, Inpres Bantuan Desa, Resettlement Desa,** Mengembangkan Teknologi **Pedesaan, dan Pola Tata Desa.**

Dari jumlah 1.717 **Desa (1982) yang mendapat Bantuan Desa tingkat perkembangan sebagai berikut: Desa Swadaya 589 (34,30%), Desa Swakarya 959 (55,85%), Desa Swasembada sebanyak 169 (9,84%) yang** tersebar pada 56 Kecamatan UDKP (Tahun 1982). Lihat Tabel II-13

10. Rural Development

The province of Moluccas as the region of 1000 islands with the population in 1983 about 1.439.000 people, of which mosth of them (80%) are living in the rural areas and scattered in 1.717 villages.

From the amount of villages mentioned above including the villages undergoing name change/names transformation/status of villages into village public administration, and the blooming of the village area into village public administration by the letter of decision of the Minister of Domestic Affairs each no 140-133 dated 14 February 1981. By this letter of decision the amount of nominatives of villages / villages public administration in the province of Moluccas become 1.717 villages. Table II - 12a

From 1.717 villages which are declared/confirmed by the letter of decision of the Minister of Home Affairs concerned, just 1.694 villages have the right to get the monetary aids for the rural development through the Inpres program for the rural development aids every year. Those not yet having the change of getting the rural development aids are as many as 23 villages/villages public administration.

In general the villages/villages public administration concerned are villages located at the coast or in other words are located in the coastal areas, except some villages in the island of Seram. Besides that the population are mostly concentrated on the small islands like Saparua, Haruku, Ambon, Ternate, Kei Kecil with their natural potentialities which are very limited.

The condition of those villages in principle are different from one another, either in the quantity of population, structure of village administration, natural potentiality, income rates, social welfare, education, traditional customs, or their environment condition.

The labour force is increasing, especially in the small islands, like : Saparua, Haruku, Ternate, Ambon and Kei Kecil, with population growth of great speed and the natural potentiality relatively very restricted, and the environment condition are threatened. In the villages the labour force in supply are very limited, the ability to exploit and develop the environment, and due to less ability of skillness and not yet in the possession of infrastructure and means.

Besides that in the inland region of the major islands like the island of Seram, Buru, Halmahera, and the island of Taliabu, there are still premondial tribes which are mostly not yet being settled to the edequate regions to form a way of life and better living environment.

Therefore based on the conditioned mentioned above and in lines with the sense of development, the problems of rural development needs to be taken into consideration and given priorities in the planning of development.

In the realization of development during the last decade the rural development has been running well, being tacled with well-oriented objectives and intensively, covering various aspects of living in the rural areas with the aim to accelerate the development and growth of self-propelling villages to self working villages towards the self-supporting villages.

The national target to be achieved as the self-supporting villages (Pelita III) as much as 4% per year with the estimation of the year 2000 the whole rural areas have been in the possession of self-supporting villages. By the increase of the villages quantity due to the villages blooming and the forming of new villages, the target of development of self-supporting villages during Pelita IV is increased to 7% each year (the national target).

The results achieved every year during Pelita III in the province of Moluccas as much as 1,3% which means still far under the national target. For the quickening of gaining the target of self-supporting villages in various efforts done through the system of development working region units as a system of planning and implementation and evaluation on the development with the area as big as one sub-district, holding villages competition, family welfare promotion, Inpres on rural development aid, resttlement of villages, the development of technology in the rural areas, and the pattern of villages arrangement.

From the amount of 1.717 villages (1982) getting the rural aids having the development growth as follows : self-initiatives villages are 589 (34,30%), self-working villages 959 (55,85%), self-supporting villages 169 (9,84%) which are scattered in 56 sub-districts of development working region units (1982). See Table II - 13.

The implementationof villages competition as an activity in mobilizing all vilages to tkae parts/compete in the villages development has the intention to stimulate the interest of the society in building up the villages.

The villages competition which has begun since the second year Pelita II till the last year Pelita III has resulted in 114 champion villages which are expected that those champion villages would maintain and further develop their prestiges, physically or non-physically.

Tabel / *Table II — 13*

KEADAAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DI MALUKU SAMPAI AKHIR PELITA III

THE CONDITION OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MOLUCCAS TILL THE END OF PELITA III

No	Kabupaten/ Kotamadya *District Municipality*	Jlh Kec. *Quantity of Sub-districts*	Jlh Desa Kelurahan *Quantity of Villages and Village Administ*	Swadaya *Self-initiatives*	Tingkat Perkembangan Desa/Kl. *Rural Development Rate* %	Swakarya *Self-srking*	%	Swasembada *Self-sup-porting*	%	Ket. *Note*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kodya Ambon/ *The Municipality of Ambon*	3	40	–	–	8	32	80	20	
2.	Maluku Utara/ *North Moluccas*	21	589	245	41,6	320	24	40,7	54,33	
3.	Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	18	459	91	18,83	306	62	13,5	66,67	
4.	Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	8	529	91	51,23	220	39	7,37	41,59	
5.	Maluku Tengah/ *Central Halmahera*	6	102	15	14,71	77	10	9,8	75,49	

Sumber : Pemda Dati I Propinsi Maluku.

Source : The Provincial Government of Moluccas.

Penyelenggaraan perlombaan desa sebagai suatu kegiatan yang mengikutsertakan semua desa untuk berperan/berlomba dalam pembangunan desanya bertujuan untuk mendorong minat masyarakat membangun desanya.

Perlombaan desa yang dimulai sejak tahun ke 2 Pelita II sampai dengan tahun terakhir Pelita III telah menghasilkan 114 desa juara yang diharapkan agar desa-desa yang pernah mendapat juara tersebut dapat mempertahankan dan terus mengembangkan prestasi desanya, baik fisik maupun non fisik.

Permasalahan yang dihadapi yaitu sejak tahun 1979, Departemen Dalam Negeri menghapuskan hadiah kejuaraan untuk tingkat Kabupaten Daerah Administratif Halmahera Tengah, yang menyebabkan keleluasaan bagi Daerah Administratif tersebut untuk mengikuti perlombaan setiap tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa Daerah Administratif Halmahera Tengah meliputi 6 (enam) wilayah Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan dan setiap tahunnya memperoleh Bantuan Pembangunan Desa sehingga perlu didorong dengan pelaksanaan pembinaan dan penyediaan hadiah untuk lebih merangsang kegiatan dimaksud.

Dalam upaya untuk memfungsikan Lembaga Desa yang ada, maka sampai dengan tahun terakhir Pelita III telah dididik sebanyak 5.340 orang tenaga Kader Pembangunan Desa termasuk Kader PKK. Untuk dapat menggerakkan LKMD secara merata sebagai perancang dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa diperlukan minimal 5 (lima) orang Kader pada tiap desa.

Dibandingkan dengan jumlah yang telah ada baik yang dididik melalui dana yang disediakan melalui APBD, diperlukan tenaga kader sebanyak 3.245 orang lagi.

Teknologi Desa yang merupakan sarana untuk menunjang masyarakat desa dalam Pelita III perlu diinvestasikan dan dikembangkan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Disamping hasil yang dicapai selama 2 (dua) Pelita tersebut masalah-masalah yang belum teratasi dan akan dihadapi pada Repelita IV antara lain:

- Masih terdapat desa-desa yang terpencil atau terisolasi dari pusat-pusat pembangunan.
- Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang yaitu ada desa yang berpenduduk padat dengan jumlah tenaga yang melebihi daya tampung desa, dan desa berpenduduk lebih sedikit dibanding dengan potensi desa yang tersedia.
- Pemerintah Desa dan Lembaga Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- Lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat seperti LKMD, PKK, KUD, belum berkembang sebagaimana yang diharapkan.
- Tingkat kesadaran untuk ketrampilan penduduk masih belum memadai menyebabkan produktifitas dan pendapat masyarakat yang rendah.

Selain dari pada itu, masih banyak hal yang berkaitan dengan Pembangunan Desa seperti peningkatan produksi dan pemasaran, ren-

The problems faced since the year 1979, the department of domestic affairs eliminate the rewards on championship for the district of Central Halmahera, which causes a freedom for the administration region concerned to follow the annual competition.

As it is already known that the administration region of Central Halmahera is covering 6 sub-districts and 102 villages/villages public administration and every year gets a subsidy for the development of villages so that they ought to be stimulated in the realization of fostering and supply of rewards in order to give more incentives for the activities mentioned.

In the attempts to functionate the village institutions in existence, up till the last year of Pelita III there have been trained 5.340 people as cadres of village development including cadres of family welfare promotion. For the purpose of mobilizing the rural community resilience institution of equitable distribution as the designer and the implementer of development in rural areas are needed minimum 5 cadres in every village.

Compared to the amount in existence, either trained by the utilization of funds via the regional revenues and budget, cadres are needed as many as 3.243 people in addition.

Rural technology which is the means to sustrain the rural sociaty needs to be invested and developed in Pelita III so that the income of the socety could be enhanced.

Besides the results having been achieved during the two Pelitas concerned, the problems not yet overcome and being faced in Pelita IV among others.

- *There are still found remote villages and isolated villages from the development centres.*
- *The amount of manpower which is not well-balanced, namely there are villages densely populated with an amount of excessive labour force to be accomodated in the villages, and the villages of lesser inhabitants compared to the village potentiality.*
- *The village authority and village institution which is formed under the Law no 5 in the year 1979 is not yet functioning as it ought to be.*
- *The institution that can mobilize the social participation like the rural community resilienc institution, family wefare promotion, rural cooperative units, are not yet blooming as expected before.*
- *The level of awareness for the skillness of the population are still not yet adequate and causes the productivity and the society's income rather low.*

Besides that, there are still many maters in relationship with the rural development like the increase of production and the marketing, the low standard of nutrition, especially among the children beneath 5 years of age, still many inhabitants are illiterate, unfeasible standard of living and environment, and other various problems which are still needing solving within the frame of eight lines of equitable distribution in Pelita IV.

11. Agraria/Agriculture

If we look at the wide areal of the province of Moluccas compared to the total amount of population in the current situation, it is still in the lower

dahnya tingkat gizi khususnya pada anak Balita, masih banyak penduduk yang buta huruf mutu perumahan dan lingkungan hidup yang belum layak, dan berbagai masalah lain yang masih memerlukan pemecahan dalam rangka pelaksanaan delapan jalur pemerataan dalam Repelita IV.

11. Agraria/Pertanian

Kalau melihat luas wilayah Propinsi Maluku dibandingkan dengan jumlah penduduknya dalam keadaan sekarang ini, masih dalam tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Namun demikian Pemetaan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku tetap menjadi tugas dan kewajiban untuk menataguna menghadapi ledakan penduduk dan upaya untuk lebih menyelamatkan kelestarian alam dan lingkungan serta menjaga produktivitas tanah.

Pengelolaan pertanahan di Maluku telah ditempuh dengan berbagai kegiatan seperti: Penyediaan tanah untuk Transmigrasi dan Resettlement, pemberian HPH dan pemberian fatwa guna tanah.

Penggunaan tanah di Propinsi Maluku menurut hasil pemetaan Direktorat Tata Guna Tanah, Ditjen Agraria Dep. Dalam Negeri sampai dengan akhir Pelita III adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan	22.088 Ha
2. Sawah 2 × setahun	173 Ha
3. Sawah 1 × setahun	151 Ha
4. Tegalan/ladang	85.325 Ha
5. Perkebunan	346.462 Ha
6. Kebun Campuran	36.047 Ha
7. Hutan Lebat	3.112.848 Ha
8. Hutan Belukar	173.974 Ha
9. Hutan sejenis	65.756 Ha
10. Semak/Alang-alang	22.712 Ha
11. Danau/Kolam/Rawa	16.985 Ha
12. Tanah Tandus/rusak	14.570 Ha

Dari luas daratan seluas 8.572.800 Ha yang sudah dipetakan baru seluas 3.897.991 Ha atau 45,47%, sebagian besar yang belum terpetakan adalah Daerah Maluku Tenggara karena ketiadaan peta kerja (Peta topografi).

Dari data tadi terlihat bahwa daerah yang belum terbuka menduduki ranking teratas. Keadaan ini dapat dimaklumi karena kegiatan penduduk hanya terkonsentrasi di pulau-pulau yang kegiatan ekonominya cukup tinggi. Misalnya Pulau Ambon, Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Sedangkan pulau-pulau lain dapat dikatakan sangat kecil sekali, malahan beberapa pulau seperti sebagian Kepulauan Aru dan lain-lain tidak ada kegiatan penduduk sama sekali.

Dalam PELITA III, yang jadi masalah bagi Pemda Maluku adalah kekurangan peta-peta situasi di setiap daerah maupun peta potensi daerah. Secara terinci jenis peta yang merupakan prasarana pembangunan yang sampai Pelita III masih merupakan prasarana pembangunan yang sampai Pelita III masih merupakan masalah pengadaan sebagai berikut:

1. Peta Topografi, merupakan peta kerja dan setiap jenis peta yang akan dibuat.
2. Peta Operasional, merupakan peta pegangan setiap kecamatan yang berisi peta penggunaan tanah, peta kemampuan tanah, peta administrasi dan tempat penting serta peta-peta lainnya.

Tata guna tanah yang lestari, optimal dan seimbang merupakan salah satu cita-cita akhir dari pembangunan nasional, oleh karena itu dengan adanya permasalahan ini perlu diambil suatu kebijaksanaan dan langkah untuk melengkapi data yang kurang sebagai prasarana dalam pembangunan di segala sektor.

Seperti diketahui bahwa peranan Tata Guna Tanah cukup penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Untuk menunjang hal tersebut kebijaksanaan yang diambil adalah dengan menyediakan sedini mungkin prasarana peta-peta tersebut dengan langkah antara lain:

1. Penyediaan peta dasar;
2. Penyediaan peta-peta operasional yang merupakan peta wilayah administratif dari setiap daerah; dan
3. Perlu peningkatan pengumpulan data yang terdiri dari data potensial daerah (penggunaan tanah, kemampuan tanah, status tanah dan sebagainya);

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman pendapat, ketepatan dan kesesuaian lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan. Dan sasarannya adalah untuk mencapai penggunaan tanah yang lestari optimal dan seimbang, yang menyangkut lingkungan hidup yang sehat dan serasi di bidang tata ruang.

Tata Agraria

Kegiatan Tata Agraria ini tidak lepas dari keadaan tata ruang. Hal ini berarti bahwa kegiatan Agraria ada kaitan dengan pihak lain yang

rate of population density. Nevertheless the mapping of the provincial government of the Moluccas is still the task and function of arranging, to face the population explosion and efforts in order to be more effective in preserving the natural resources and environment genuinity, and to maintain the land productivity.

The exploitationof land in the Moluccas has been carried out by several activities like : the land supply for the transmigration and resettlement, the right to exploit the forest potentiality, and the giving of advice on the landuse and land titles.

. The landuse in the province of Moluccas according to the results of the mapping of the Directorate of Land Use and the Directorate General of Agraria of the Department of Home Affairs up till the end of Pelita III, are as follows :

(1). Development	*22.088 ha.*
(2). Semi-annual ricefields	*173 ha.*
(3). Annual ricefield	*151 ha.*
(4). Dry ricefields/crop field	*85.325 ha.*
(5). Plantation	*346.462 ha.*
(6). Mix plantation	*36.047 ha.*
(7). Heavy jungle	*3.112.848 ha.*
(8). Bush forestry	*173.974 ha.*
(9). Homogenous forestry	*65.756 ha.*
(10). Bushes and Tares	*22.712 ha.*
(11). Lakes/pounds/morass	*16.985 ha.*
(12). Barren land/spoiled land	*14.570 ha.*

Of the land areal as many as 8.572.800 ha that has been mapped, it is just 3.897.991 ha or 45,47% that is officially recorded, a most part that has not yet been mapped are the areas in the southeastern part of Moluccas due to the lack of working map (topographical map).

From the data just mentioned we can see that the area not yet being opened is in the position of the highest ranking. This condition can be understoof because the population activities are only concentrated in the islands where the economic activities are sufficient high. For example, the island of Ambon, the island of Ternate, and the island of Tidore, while the other islands can be said of very few activities, oven some islands like a part of Aru islands and others are not in the posssession of population activities at all.

In Pelita III that has been the problem for the provincial government of Moluccas is the lack of situational mapping in every regionor the mapping on the regional potentiality. In details the types of mapping which are the infrastructure of the development, which is to the period of Pelita III still being a problem of supply, is as follows :

1. *The topograpical mapping, that functions as the working map and every kind of map being created.*
2. *The operational map, becoming the quidance map for every subdistrict which contain the map of landuse, map of land capability, map of public administration, and important places, and other kind of maps.*

The pure landuse, optimum and well-balanced is one of the final objectives of the national development, therefore due to the existence of this problem, it is necessary to take any policy and steps to accomplish the shortcoming data as the infrastructure in the development of the whole sectors.

As we already know that the role of the landuse is far enough of great importance in the determination of development priorities. To sustain such objectives the policies taken are by preparing as earlier as possible the infrastructure of the maps concerned with the steps among others :

1. *The preparation and supply of basic maps.*
2. *The preparation and supply of operational maps, which form the maps of public administration regions of each area ;*
3. *It is considered necessary to enhance the system of data collection consisting of data on regional potentiality (landuse, the land capacity, the land status, etc.).*

This matter has the intention to create uniformity of opinions, accuracy and adequacy of the location being used as development site. the objectives are to achieve the landuse which is pure preserved, optimal and well-balanced, which is in close connection with living environment of healthy aspects and harmonious in spatial advantages.

The Agrarian System

The activities on this agrarian system is not separated from the spatial condition. this matter means that the activities of the agrarian system are closely related with other parties using the same space. As we know, that the land in the sense of space is of the social characteristic, where the land and the people are mutually integrated one another. This relationship is more and more felt in the development that is running on at present.

menggunakan ruang tersebut. Seperti diketahui bahwa tanah dalam arti ruang adalah bersifat sosial dimana tanah dan manusia saling berkaitan satu sama lain. Hubungan ini makin dirasakan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

Pelaksanaan Pekerjaan Tata Agraria selama Pelita III di Propinsi Maluku sesuai dengan struktur organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata Guna Tanah

Hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan selama Pelita III di Propinsi Maluku dari Sub. Direktorat Tata Guna Tanah Propinsi Maluku sebagai berikut:

1. Pemetaan penggunaan tanah, Skala 1 : 100.000	59 blad.
2. Pemetaan Kemampuan tanah skala 1 : 100.000	41 blad.
3. Pemetaan Penggunaan Tanah detail skala 1 :25.000	67
4. Pengukuran dan Pemetaan Ibu Kota Kecamatan	6 kota
5. Pembuatan Peta Kerja skala 1 : 25.000	4 blad
6. Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Transmigrasi	62.200 Ha
7. Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Perkebunan/NES	10.000 Ha
8. Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah Perkebunan PRPTE (Proyek Rehabilitasi Perluasan Tanaman Ekspor	6.260 Ha
9. Pengukuran dan Pemetaan Tata Guna Tanah Daerah PKMT (Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing)	840 Ha
10. Penyusunan Rencana Tata Guna Tanah Daerah Tingkat II	3 Kab/ Kodya
11. Monitoring lokasi miskin	8 Unit
12. Fatwa Tata Guna Tanah	45.340 Ha

2. Landreform

Hasil-hasil yang dicapai di bidang landreform oleh Pemerintah Daerah Propinsi Maluku merupakan kegiatan penyerahan retribusi tanah kepada anggota masyarakat di 5 Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Maluku. Lihat Tabel II-14.

Tabel / *Table II — 14*

OBYEK LANDREFORM / *THE LANDREFORM OBJECTS*

No *No*	Kabupaten/Kotamadya *District/Municipality*	Luas Tanah diretribusikan yang telah (Ha) *The quantity of land being retributed (in ha)*	Penerima Retribusi (KK) *The receiver of retribution (Families)*
1	(2)	(3)	(4)
1.	Kodya Ambon/*The municipality of Ambon*	752,432	772
2.	Halmahera Tengah/*Central Halmahera*	3.387,7692	1.340
3.	Maluku Tengah/*Central Moluccas*	3.219,435	1.444
4.	Maluku Tenggara/*Southeast Moluccas*	701,1447	264
5.	Maluku Utara/*North Moluccas*	7.639,8181	1.935

continued

No	Kabupaten/Kotamadya *District/Municipality*	Luas Tanah yang telah diretribusi *The quantity of land being retributed (in ha)*	Penerima Retribusi (KK) *Receiver of retribution (Families)*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kodya Ambon/*The municipality of Ambon*	62,7814	107
2.	Halmahera Tengah/*The Central Halmahera district*	305,5458	259
3.	Maluku Tengah/*The Central Moluccas District*	104,2470	267
4.	Maluku Tenggara/*The Southeast Moluccas district*	—	—
5.	Maluku Utara/*The North Moluccas district*	—	—

3. Pengurusan Hak-Hak Tanah

Perkembangan bidang pengurusan Hak-hak tanah selama Pelita III di Propinsi Maluku dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam berbagai proyek yaitu Proyek Penertiban Peningkatan Pengurusan Hak-Hak tanah, Proyek Penyelesaian Hak Tanah Daerah Transmigrasi dan Prona. Target dalam upaya pengurusan Hak-Hak tanah ini dalam Pelita III telah tercapai kecuali Prona realisasinya hanya 50%. Lihat Tabel II-15.

The implementation of the agrarian system during the Pelita III in the province of Moluccas in accord with its organizational structure can be explaiend as follows :

1. The Landuse System

The results that have been finished during Pelita III in the province of Moluccas from the Sub-Directorate of Landuse of the province of Moluccas is as follows :

1.1. The mapping of the landuse, with the scale 1 : 100.000,59 leaves.
1.2. The mapping of land capacity, with the scale of 1 : 100.000,41 leaves.
1.3. The mapping of landuse indetails, with the scale of 1 : 25.000,67 leaves.
1.4. Measurement and mapping capitals of sub-districts, six towns,
1.5. the making of working map, with the scale of 1 : 25.000,4 leaves.
1.6. Measurement and mapping of landuse in the transmigration area, 62.200 ha.
1.7. Measurement and mapping of plantation area/NIS, 10.000 ha.
1.8. Measurement and mapping of landuse system of the plantation area on the project of rehabilitation and extensification of export crops, 6.260 ha.
1.9. Measurement and mapping of the landuse of the area of fostering of the premondial tribes, 840 ha
1.10.Composing the design of landuse planning in the districts as many as three districts/municipality.
1.11.Monitoring the location of poor inhabitants, 8 units.
1.12.The advice counselling on landuse, 45.340 ha.

2. Landreform

The results gained in the field of landreform by the provincial government of Moluccas are in the form of activities on land retribution to the society members in five districts / municipality in the province of Moluccas. See Table II - 14.

3. The Administration on Land Titles

The development in the administration of land titles during Pelita III in the province of Moluccas in implemented through several activities in various projects, namely the project of keeping in order, and acceleration of administration of land titles, project on land settlement of the transmigration and prona (agrarian special service). The target in the efforts of land administration of these lands usage in Pelita III has been achieved, except prona of which the realization is only 50 %. See Table II - 15.

4. Land Enrollment

The implementation of land enrollment in the province of Moluccas during Pelita III is laid down in the activities of projects of measurement within the frame of land recording and land blocking, general means of funds, transmigration area, and the project on land enrollment. From the target planned during Pelita III all have been realized. See Table II - 16.

5. Administration

The development of physical agrarian infrastructure in the Moluccas during Pelita III is implemented in three kinds of project activiteis namely : project of the construction of the agrarian office building of North Moluccas, the project on construction of the office building of the Directorate Agraria of the Province of Moluccas, the project on constructionof the office building of the Agrarian Service of Central Moluccas (Masohi) and the project of regional prona (special agrarian service).

The target planned during Pelita III has been achieved commensurating with the realization gained. See Table II - 17.

6. Family Welfare Promotion

The implementation of family welfare promotion programs in the Moluccas from year to year has undergone improvement, either from the point of quantity or from the point of quality, especially in the realization of the ten programs of the family welfare promotion and the programs on other women's role promotion.

The quantitative picture, in particular concerning the implementation of the programs on the family welfare promotion through the utilization of Inpres aid for rural development also form an unseparable part of rural development.

Parallel with the guidance given by the motivating team from the central headquarterof family welfare promotion programs through the national working meeting which is first hald in Jakarta, and the second national working conference, therefore in the regional level some policies are taken, either through the forum of regional working conference, consultation meeting, training of management for the executive board/the motivating team for the family wefars promotion, and other activities on motivating the family welfare promotion

Tabel / *Table II — 15*

PERKEMBANGAN BIDANG PENGURUSAN HAK–HAK TANAH (PHT) SELAMA PELITA III DI MALUKU
THE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ADMINISTRATION ON LAND DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS

No.	Jenis Proyek *Types of Project*	1980/1981		1981/1982		1982/1983		1983/1984	
		Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Proyek Penertiban Peningkatan Pengurusan Hak-Hak Tanah (P3HT)/ *Project on keeping order, administration of land titles*	—	—	1.114 SK	1.114 SK	1.178 SK	1.176 Sk	1.100 SK	540 SK
2.	Proyek Penyelesaian/ *Project on resettlement*	12.000 Ha	12.000 SK	45.000 SK	72.000 Ha	72.000 Ha	72.000 Ha	20.000 Ha	20.000 Ha
	Hak Tanah Daerah/*of transmigration area*	6.000 SK	4.119 SK	7.200 Ha	7.200 Ha	17.400 Ha	17.400 Ha	3.600 Ha	6.800 Ha
	Transmigrasi/*Transmigration*			3.600 SK	0	3.600 SK	0	10.200 SK	0
3.	P r o n a/ *Special agrarian service*	—	—	—	—	—	—	5.000 SK	2.785 SK

Tabel / *Table II — 16*

PERKEMBANGAN BIDANG PENDAFTARAN TANAH SELAMA PELITA III DI MALUKU
DEVELOPMENT IN THE FIELD OF LAND ENROLLMENT DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS

No.	Jenis Proyek *Types of Project*	1980/1981		1981/1982		1982/1983		1983/1984	
		Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Proyek Pengukuran Keliling Perkaplingan Dana Sarana Umum Daerah Transmigrasi/ *Project of measurement within the frame of land recording and land blocking*	12.000 Ha	12.000 Ha	7.200 Ha	7.200 Ha	17.400 Ha	17.400 Ha	13.000 Ha	13.000 Ha
2.	Pendaftaran Tanah/ *Land Enrollment*	3.255 Bh	3.255 Bh	3.926 Bh	3.926 Bh	866 Bh	866 Bh	322 Bh	322 Bh

4. Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Propinsi Maluku selama Pelita **III dituangkan dalam kegiatan proyek Pengukuran keliling perkaplingan dana sarana Umum Daerah Transmigrasi dan Proyek Pendaftaran Tanah. Dari target yang direncanakan selama Pelita III semua dapat** direalisasi. Lihat Tabel II-16.

5. Administrasi

Pembangunan prasarana fisik keagrariaan di Maluku selama Pelita III dilaksanakan dalam tiga kegiatan Proyek yaitu Proyek Pembangunan Gedung Kantor Agraria Maluku Utara, Proyek Pembangunan Kantor Direktorat Agraria Propinsi Maluku, Proyek pembangunan Gedung Kantor Agraria Maluku Tengah (Masohi) dan Proyek Prona Daerah. Adapun target yang direncanakan selama Pelita III telah tercapai sesuai dengan realisasi yang diperoleh. Lihat Tabel II-17.

12. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Propinsi Maluku dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam pelaksanaan 10 Program PKK serta program peningkatan peranan wanita lainnya.

Penggambaran secara kuantitatif terutama mengenai pelaksanaan Program PKK melalui pemanfaatan Dana Inpres Bantuan Desa juga **merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan masyarakat desa.**

Sejalan dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tim Penggerak PKK Pusat melalui Rapat Kerja Nasional yang pertama di Jakarta dan Rakernas PKK ke dua, maka di tingkat Daerah ditempuh **beberapa kebijaksanaan baik itu melalui Forum Rapat Kerja Daerah, Rapat Konsultasi, Latihan Manajemen bagi Pengurus/Tim Penggerak PKK dan lain-lain kegiatan pembinaan telah diberikan petunjuk serta pembinaan dalam upaya penyeragaman sistem Administrasi dan pemantapan sistem dan mekanisme pelaporan yang dapat memungkinkan adanya arus informasi dan komunikasi timbal balik yang efektif.**

programs, have been given instruction and guidance in the attempts to make uniform administration system and the consolidation of system and mechanism of reporting that create possibilities to the flow of information and two ways traffic communication that is quite effective.

In the attempts to stabilize the administration system therefore in the year 1984/1985 through the sustaining Inpres fund for rural development especially for the family welfare promotion programs, a uniformity has been conducted in the system of administration of the family wefare promotion as many as 12 books, which are distributed to 1.694 villages/villages public administration in the province of Moluccas, the same case is it with the motivating team of the sub-distrcit, district and provincial family welfare promotion.

Besides that, through the Inpres aid for rural development in the year 1985/1986 in the efforts to stabilize the administration also it is guided to make monographical data on family welfare promotion as desired by the central motivating team of the family welfare promotion. Till the year 1986/1987 nearly most of the villages/villages public administration are already in the possession of data board for monographic data of the family welfare promotion.

In sustaining the activities of family welfare promotion, especially on the district level and sub-district level, through the subsidiary funds for repatriation there have been built a number of infrastructure for the family welfare promotion, which is simultaneously funtioning as the office/secretariate of the motivating team of the family welfare promotion programs. Up till the year 1986/1987 there have been built 8 buildings which are scattered in 4 districts.

The implementation of the organization is oriented to stabilize the position of the motivating team of family welfare promotion programs as the means that is able to coordinate the society's movement from the lower level in the implementation of the family welfare promotion programs.

Based on the decision of the Minister of Home Affairs no 30 anno 1981 on the establishment of motivating team for the rural community resilience nstitution and the motivating team of family welfare promotion programs and the instruction of the Minister of Home Affairs no 29 anno 1981 therefore on the provincial level the Governor Letter of Decision is issued under the no Kpts.690/GMAL/1981 on the formation of the motivating team for the rural community resilience institution and the motivating team for the family welfare promotion programs for the province of Moluccas.

The formation of the motivating team for the family welfare promotion

Tabel / *Table II - 17*

KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA FISIK KEAGRARIAAN SELAMA PELITA III DI MALUKU
ACTIVITIES ON THE DEVELOPMENT OF AGRARIAN PHYSICAL INFRASTRUCTURE DURING PELITA III IN MOLUCCAS

		1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983	
No	Jenis Proyek *Types of Project*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*	Target *Target*	Realisasi *Realization*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pembangunan Gedung Kantor Agraria Maluku Utara (Ternate)/ *Project of the construc- of the Agrarian Office Building of North Moluccas (Ternate)*	300 M2	300 M2	–	–	–	–	–	–
2	Pembangunan Gedung Kantor Direktorat Agraria Prop. Maluku (Ambon)/ *Project on Construction of the office building of the Directorate of Agrarian of the Province of Moluccas (Ambon)*	–	–	600 M2	600 M2	–	–	–	–
3	Pembangunan Gedung Kantor Agraria Maluku Tengah Masohi/ *Project on Construction of the office building of the Agrarian Service of Central Moluccas Masohi)*	–	–	–	–	300 M2	300 M2	–	–
4	Prona Daerah/ *Regional Agrarian Special Service*	–	–	–	–	–	–	10.000SK	10.000SK

Dalam upaya tertib administrasi maka pada tahun 1984/1985 melalui dukungan Dana Inpres Desa khususnya untuk PKK telah diadakan penyeragaman buku-buku administrasi PKK sebanyak 12 buah yang disebarkan pada 1.694 buah desa/Kelurahan di Propinsi Maluku, demikian pula untuk Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kabupaten/ Kotamadya dan Propinsi.

Selain itu melalui dana Inpres Desa tahun 1985/1986 dalam upaya pemantapan administrasi juga telah diarahkan untuk pembuat data Monografi PKK sebagaimana yang dikehendaki oleh Tim Penggerak PKK Pusat dan sampai dengan tahun 1986/1987 hampir sebagian besar Desa/Kelurahan telah memiliki papan data Monografi PKK.

Dalam menunjang kegiatan PKK, khususnya di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan maka melalui dana bantuan Repatriasi telah dibangun sarana-sarana kegiatan PKK yang sekaligus difungsikan sebagai kantor/sekretariat TIM Penggerak PKK. Sampai dengan tahun 1986/1987 telah dibangun 8 buah gedung PKK yang tersebar di 4 daerah tingkat II.

Pelaksanaan Organisasi diarahkan untuk memantapkan kedudukan Tim Penggerak PKK sebagai wadah yang dapat mengkoordinasikan gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan Program PKK.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pembentukan Team Pembina LKMD dan Team Peng-gerak PKK dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 29 tahun 1981, maka ditingkat Propinsi diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala **Daerah Tingkat I Maluku No KPTS. 690/GMAL/1981 Tentang Pembentukan Tim Pembina LKMD dan TIM Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.**

Pembentukan Tim Penggerak PKK di Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan se—Maluku, sedangkan pada tingkat desa/ kelurahan kegiatan PKK disalurkan melalui Seksi PKK pada LKMD masing-masing desa/kelurahan. Dengan semakin berkembangnya gerakan PKK untuk lebih memungkinkan jangkauan pembinaan yang lebih efektif di tingkat desa/kelurahan.

Sampai tahun 1986 di semua tingkat Pemerintahan telah dibentuk Tim Penggerak PKK dan untuk meningkatkan kemampuan Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui dana

programs on the district level/municipality and sub-districts the whole Moluccas, while on the village level/village public administration level, the activities of the family welfare promotion programs are carried out through the section of family welfare promotion programs in the rural community resilience institution in every village/village public administration. By the more and more improvement of the family welfare promotion programs in order to open opportunities to achieve effective motivating efforts on the village level/village public administration.

Up till the year 1986 in all levels of public administration there have been established the motivating team for family welfare promotion programs and in order to accelerate the capacity of the motivating team for family welfare promotion programs in carrying out its task. Through the national revenues and budget fund, especially the project on efficency of the rural development there has been held trainings for the executive boards/motivating team for the family welfare promotion programs on the provincial, district/ municipality, and sub-district level. The motivating team for the family welfare promotion programs in details, which have been following the trainings on the management of family welfare promotion programs till the year 1987 can be analysed as follows :

a. *Training on the management for family welfare promotion programs on provincial level, attended by 40 participants, in lines with the governor's decision cq. the head of the Directorate of Rural Development of the province of Moluccas no 411.4/SK/N/Bangdes, which is carried out in Ambon from 22 - 26 January 1985.*
b. *Training on the management for family welfare promotion programs on the district level of Southeast Moluccas and Central Moluccas which is attended by 90 participants. With the detailed explanation : southeast Moluccas 30 persons, Central Moluccas 30 persons of the executive board of the motivating team on the district level, and 30 participants of the motivating team of the sub-district from Central Moluccas.*
c. *Training on the management for family welfare promotion program on the level of the municipality of Ambon, attended by 30 participants, which is carried out on 7 - 11 Feubruary 1986.*
d. *Training on the management for family welfare promotion program on the level of the district of North Moluccas attended by 60 participants,*

APBD khususnya Proyek Peningkatan Daya Guna Pembangunan Desa telah diadakan latihan bagi Pengurus/Tim Penggerak PKK pada Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan. Adapun perincian Tim Penggerak PKK yang mengikuti Latihan Pengelolaan/Manajemen PKK sampai dengan tahun 1987 dapat diperinci sebagai berikut:

a. Latihan Pengelolaan PKK Tingkat Propinsi diikuti 40 orang peserta sesuai Surat Keputusan Gubernur c.q. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Maluku No 411.4/SK/N/Bangdes, yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 22 s/d 26 Januari 1985.
b. Latihan Pengelolaan PKK Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah yang diikuti 90 orang peserta. Dengan perincian Maluku Tenggara diikuti 30 orang, Maluku Tengah diikuti 30 orang Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten dan 30 orang peserta Tim Penggerak PKK Kecamatan se—Maluku Tengah.
c. Latihan Pengelolaan PKK Tingkat Kotamadya Ambon, yang diikuti oleh 30 orang peserta, dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Pebruari 1986.
d. Latihan Pengelolaan PKK Tingkat Kabupaten Maluku Utara diikuti 60 orang peserta terdiri dari 30 orang pengurus/Tim Penggerak PKK Kabupaten dan 30 orang Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Dengan demikian sampai tahun 1987 jumlah pengurus/TIM Penggerak PKK yang telah mengikuti Latihan Manajemen/Pengelolaan PKK baik dari tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kecamatan sebanyak 220 orang. Selain itu kader-kader PKK yang telah dilatih dalam bidang Kesehatan, Gizi, dan lain-lain jumlahnya sudah tercantum.

Pelaksanaan Program PKK

Pelaksanaan Program PKK di Propinsi Maluku sejak tahun 1982/1983 sampai 1986/1987 telah mengalami peningkatan-peningkatan terutama dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Gambaran tentang pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat digambarkan sampai dengan tahun 1986/1987 menurut kelompok kerja (Pokja) sebagai berikut:

Pokja I

Hasil-hasil yang telah dicapai didalam pelaksanaan Program PKK melalui Pokja I meliputi Bidang P4 dan Gotong Royong yaitu:

- Penataran P4 bagi kaum wanita Pola 45 jam telah diikuti oleh 916 orang.
- Penataran P4 Pola Pendukung 25 jam diikuti oleh: 1.063 orang kaum wanita.
- Penataran Pola Pendukung 17 jam diikuti oleh 8.796 orang kaum wanita.
- Penataran bagi fasilitator permainan simulasi telah diikuti oleh 478 orang.
- Pembentukan kelompok Simulasi P4 sebanyak 378 kelompok.
- Di bidang Gotong Royong telah diberikan berbagai pembinaan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan kegiatan-kegiatan Gotong Royong di tingkat Desa dalam rangka menunjang pelaksanaan program-program PKK (data selengkapnya dapat dilihat pada Monografi terlampir).

Pokja II

Pelaksanaan program PKK pada Pokja II yaitu meliputi bidang Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan kehidupan berkoperasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Latihan dalam upaya peningkatan Pengetahuan bagi pengurus Tim Penggerak PKK baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun Kecamatan, Kabupaten dan ditingkatkan Propinsi.
- Pelaksanaan berbagai latihan teknis bekerja sama dengan berbagai Instansi sektoral yang mendukung pelaksanaan Program PKK yaitu: Kursus Kesehatan, Gizi, Pengelolaan KB, Kejar Paket A dan lain-lain.
- Di bidang Perkoperasian telah dilaksanakan Latihan Perkoperasian di beberapa Kabupaten, dimana untuk tahun 1985/1986 telah dilatih 90 orang anggota PKK yang sekaligus merupakan tenaga-tenaga motivator bagi pengembangan usaha perkoperasian.
- Selain itu juga telah diberikan berbagai motivasi dan penyuluh perkoperasian yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Pokja III

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan PKK khususnya pada Pokja III lebih banyak bersifat penyuluhan dan motivasi upaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga masyarakat terutama kaum wanita dalam menggunakan sandang-pangan serta pengaturan tata laksana rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.

consisting of 30 persons of executive board/motivating team of the district level, and 30 persons of the motivating team on the subdistrict level.

Doing so up till the year 1987 the number of executive board/motivating team for family welfare promotion programs that have followed the training on management, either the training for the provincial, district, and subdistrict level, there have been as many as 220 persons. Besides that the cadres of family welfare promotion programs that have been trained in the field of health, nutrition, and others, the sum has been decided.

Implementation of Family Welfare Promotion Programs

The implementation of family welfare promotion programs in the province of Moluccas since the year 1982/1983 till 1986/1987 have been improved, especially in the implementation of the ten primary programs of the family welfare promotion programs. A picture of the implementation of the ten primary programs of the family welfare promotion can be expounded in details till the year 1986/1987 commensurating with the working groups is as follows

Working Group I (Pokja I)

The results achieved in the implementation of family welfare promotion programs through the Working Group I through the field of Guide to Enlightment and Application of Pancasila (P4) and mutual assistance :

- *Upgrading course in the Guidance to Enlightment and Application of Pancasila (P4) for the Women with the 45 hours pattern, have been attended by 916 persons.*
- *Upgrading course in the guide to enlightment and application of Pancasila (P4) within the sustaining pattern of 25 hours, attended by 1.063 female participants.*
- *Upgrading course for facilitators of simulation game have been attended by 478 persons.*
- *The forming of simulation game groups on the guide to enlightment and application of Pancasila, as many as 378 groups.*
- *In the field of mutual assistance many have been given guidance and instruction within the frame of encouraging the activities on mutual assistance in the rural areas as the sustaining realization of the family welfare promotion programs (the complete data can be seen at the enclosed monographic picture).*

Working Group II (Pokja II)

The implementation of Family Welfare Promotion Programs in the Working Group II is covering the fields of education and skill and the development of Cooferatives system. The activities having been done in general can be pictured as follows :

- *Implementation of training in the efforts to accelerate the knowledge for the executive board/motivating team of family welfare promotion programs, either on the level of villages/village public administration, subdistrict and district, and provincial level.*
- *Implementation of several training on techniques in cooperation with several institutions sustaining the implementation of family welfare promotion programs : courses on healt, nutrition, family planning practice, study club of package A, etc.*
- *In the field of cooperatives it has been conducted training on cooperatives in some districts, where for the year 1985/1986 a number of 90 persons of the family welfare promotion programs members been trained, which are simultaneously acting as motivators for the attempts on the promotion of cooperatives.*
- *Besides that there also have been given various motivation and guidance on cooperatives, conducted by the motivating team of the family welfare promotion programs in various levels of government institutions.*

Working Group III (Pokja III)

The implementation of the activities of the family welfare promotion programs, especially for the Working Group III, is more inclined to the activities on guidance and motivation, as the efforts to give understanding and knowledge to the members of the society especially the women in the usage of foods and clothes and the management of the household according to the values of the national culture.

This motivation and guidance also are done through various media of information publised by the family welfare promotion executive board or through various cooperations with other sectoral institutions including posters, leaflets, brochures etc.

Working Group IV (Pokja IV)

The implementation of family welfare promotion programs covering health, preservation of living environment, and the health planning in the province

Motivasi dan penyuluhan ini juga dilakukan dengan melalui berbagai media penyuluhan yang diterbitkan oleh PKK maupun dalam usaha kerja sama dengan berbagai Instansi sektoral meliputi poster, leflet, brosur dan lain-lain.

Pokja IV

Pelaksanaan kegiatan PKK pada Pokja IV yang meliputi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan sehat di propinsi Maluku mendapat penekanan atau prioritas utama.

Hal ini disebabkan, karena pelaksanaan kegiatan Pokja IV terutama di bidang Kesehatan pada akhir Pelita III berada didalam kondisi yang cukup memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan, karena tingkat kematian bayi, kondisi kesehatan masyarakat yang masih rendah. Tahun pertama Pelita III angka kematian bayi di Propinsi Maluku diperkirakan 120 bayi yang mati diantara 1.000 kelahiran bayi.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, maka Tim Penggerak PKK pada setiap tingkatan pemerintahan bekerja sama dengan instansi Kesehatan. Kegiatan-kegiatan di bidang Kesehatan dilaksanakan meliputi:

- Usaha perbaikan gizi keluarga.
- Penyuluhan tentang kesehatan dan gizi.
- Pembentukan Pos-pos Pelayanan Kesehatan (Posyandu), sampai dengan tahun 1986 telah dibentuk 473 Pos Pelayanan Kesehatan.

Untuk lebih meningkatkan peranan Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan tugas/peran bantu di bidang kesehatan, maka melalui Rapat Konsultasi PKK telah diberikan berbagai petunjuk praktis tentang keterlibatan PKK dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kesehatan dan gizi.

Pelaksanaan Program P2W—KSS

Pelaksanaan program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau disingkat Program P2W—KSS dari tahun 1982/1983 sampai dengan tahun 1986/1987 di Propinsi Maluku diarahkan pada proyek/binaan yang ditetapkan setiap tahun dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.

Pelaksanaan program P2W—KSS pada lokasi-lokasi desa proyek pada umumnya telah memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan peranan wanita serta taraf hidup masyarakat. Walaupun disadari bahwa pelaksanaan proyek P2W—KSS yang ditunjang oleh berbagai instansi sektoral kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memadukan kegiatan proyek. Disebabkan tidak semua Instansi yang secara merata dapat jatah proyek sesuai dengan jumlah desa yang ditetapkan.

Akan tetapi dengan adanya kompetisi bagi desa-desa pelaksana program P2W—KSS khususnya pada Peringatan Hari Ibu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita No 10/KEP/MENUPW/VIII/1984 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pelaksana Terbaik Program P2W—KSS dan PKK, maka hal ini telah mendorong Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Tingkat II untuk senantiasa berusaha melibatkan berbagai Instansi pendukung Program P2W—KSS untuk dapat memberikan penyuluhan dan motivasi terhadap jenis-jenis kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di desa proyek. Demikian pula dengan berperannya tim penggerak PKK sebagai unsur penggerak kaum wanita di dalam mengikuti program P2W—KSS telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan peranan wanita di dalam pembangunan desa.

Selain proyek P2W—KSS maka Propinsi Maluku juga telah diberikan bantuan proyek perintisan Peningkatan Pendapatan Keluarga melalui PKK, proyek tadi merupakan kerjasama antara tim penggerak PKK Pusat dengan Unicef. Proyek ini dilaksanakan pada tahun 1984/1985 bersama-sama dengan 12 Propinsi lainnya di Indonesia. Proyek Peningkatan Pendapatan Keluarga/P2K di Propinsi Maluku diikuti oleh 30 orang pengusaha wanita atau pengrajin wanita yang tersebar pada 3 Kecamatan di Kotamadya Ambon. Adapun jenis kerajinan yang dikembangkan melalui proyek ini meliputi:

- Kerajinan tangan kerang-kerangan/siput diikuti oleh 10 orang keluarga.
- Kerajinan tenun ikat diikuti oleh 14 orang keluarga.
- Kerajinan tangan dari cengkeh diikuti oleh 6 orang keluarga.

Pelaksanaan proyek P2K ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan usaha bagi kaum wanita/PKK terutama mereka yang telah memulai usaha-usaha kerajinan namun belum dapat berkembang dengan baik karena kekurangan modal usaha. Kepada para peserta program setelah mengikuti latihan diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 100.000,-. Sampai tahun 1986 sebagian modal usaha telah dikembalikan oleh peserta proyek dan modal tersebut juga dikembangkan pada usaha-usaha PKK pada Kabupaten-kabupaten yang lain di Propinsi Maluku.

of Moluccas, gets the emphasis or priorities.

This fact is caused due to the implementation of the activities of Working Group IV especially in the field of health at the end of Pelita III is in the condition of requiring attention. This is because the baby mortality rate and the society's health condition is still of low standard. In the first year of Pelita III the baby mortality rate in the province of Moluccas is estimated 120 babies among 1000 babies.

For the purpose of accelerating the health service and efforts to reduce baby mortality rate, therefore the motivating team of the family welfare promotion programs on every level of authority cooperate with the health institution. Activities in the field of health carried out are covering :

- *Efforts in improvement of nutrition of the family.*
- *Information on the health and nutrition.*
- *Forming of serving health posts (posyandu), till the year 1986 there have been formed 173 posts for serving health.*

To accelerate the role of the motivating team for the family welfare promotion in the implementation of task/auxiliary role in the field of health, therefore through the consultative meetings for family welfare promotion programs there have been given several practical guidance on the involvement of the family welfare promotion programs in the implementation of tasks in the fields of health and nutrition.

Implementation of Programs for Promotion of Women's Role for a Healthy and Prosperous Family (P2W — KSS = Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera).

The implementation of P2W – KSS from the year 1982/1983 till the year 1986/1987 in the province of Moluccas, is directed to the project/guidance decided every year by the letter of decision of the gobernor of the profince of Moluccas.

The implementation of P2W – KSS in the rural location projects in general have given positive impacts in accelarating the women's role and the standard of living of the society. Although people are aware of the implementation of projects P2W – KSS sustained by various sectoral institutions, sometimes undergo difficulties in improving the activities of the project. This fact is due to the condition that not all institutions get equitable distribution of projects shares according to the amount of villages decided upon.

With the existence of villages competition wirhin the implementation of P2W – KSS programs, however, especially at the commemoration of Mothers Day as stipulated n the letter of decision of the Minister of Women's Affairs No 10/Kep/Men.UPW/VIII/1984 on the rewards to the best participant of the programs on P2W – KSS and family welfare promotion, therefore in this case it has stimulated the regional government, in particular the district government in order always to participate various sustaining institutions of the program of P2W – KSS to give information and motivation on the types of activiteis that should be carried out in the rural projects. The same case is it with the role of the motivating team of family welfare promotion programs as the element of motivator to women in following the programs of P2W – KSS have given positive impacts to the acceleration of women's role in the rural development.

Except the programs of P2W – KSS the province of Moluccas also has given subsidy on the pioneering projects in the increasing family income through the programs of family welfare promotion, which projects is a cooperation between the central motivating team for family welfare promotion with the UNICEF.

This project is carried out in the year of 1984/1985 together with other twelve provinces in Indonesia. The project on enhancing family income in the province of Moluccas is attended by 30 women entrepreneurs and women industrialists scattered in the subdistricts in the municipality of Ambon. The types of handicrafts being developed through this project is covering :

- *Handicrafts on shells and oysters/snales, followed by 10 persons.*
- *Handicraft on waving, attended by 14 persons.*
- *Handicraft on cloves, attended by 6 persons.*

The implementation of the project on enhancing family income is intended to sustain the acceleration of enterprise for the women / family welfare promotion programs, especially those who have begun with handicraft enterprise, but not yet been able to improve sufficiently due to lack of enterprising capital. To the program participants after attending the taining, they are given auxiliary enterprising capital as big as Rp100.000, –

Up till the year 1986 a part of the enterprising capitals have been returned by the participants of the project and the capital concerned is also developed in the efforts of the family welfare promotion programs in other districts in the province of Moluccas.

B A B / *CHAPTER III*

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

ECONOMIC DEVELOPMENT

PELAKSANAAN pembangunan bidang ekonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku sejak Pelita I hingga Pelita III dilihat dari sumbangan berbagai sektor menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku tahun 1984 sebesar 7,5% sesuai dengan kenaikan PDRB atas dasar konstan tahun 1975 dari tahun 1983 yang berjumlah Rp 191.190,410 juta ke tahun 1984 yang berjumlah sebesar Rp 205.555,782 juta. Pada tahun 1979 Produk Domestik Regional Bruto Maluku atas dasar harga konstan 1975 adalah Rp 140.387,560 juta telah meningkat menjadi Rp 205.555,782 juta tahun 1984. Kenaikan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahun (kurun waktu 1979—1984) sebesar 7,92%.

Sektor-sektor yang mengalami kenaikan pada tahun 1984 adalah sektor pertanian sebesar 6,39%; sektor industri sebesar 34,79%; sektor listrik dan air minum sebesar 5,77%; sektor perdagangan sebesar 22,32%; sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,62%; sektor bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar 39,37%; sektor sewa rumah sebesar 2,69%; sektor pemerintahan dan pertahanan sebesar 6,04% dan sektor jasa-jasa sebesar 3,26%. Sebaliknya sektor pertambangan dan penggalian dan sektor bangunan/konstruksi keduanya mengalami penurunan pada tahun 1984 yaitu masing-masing sebesar 17,14% dan 5,27%.

Dilihat dari perhitungan atas dasar harga berlaku, maka PDRB Propinsi Daerah Tingkat I Maluku pada tahun 1984 adalah sebesar Rp 629.929,- juta, jika dibanding dengan tahun 1983 yang berjumlah Rp 560.820 juta berarti terjadi kenaikan sebesar 12%. Sedangkan kenaikan secara riel yang diperlihatkan oleh kenaikan Pendapatan Regional Perkapita atas dasar harga konstan 1975 pada tahun 1984 adalah 4,51%. Secara riel rata-rata kenaikan Pendapatan Regional Perkapita Propinsi Dati I Maluku setiap tahun selama kurun waktu 1979 s/d 1984 terdapat sebesar 4,12%.

Sedangkan PDRB per Kabupaten/Kotamadya berdasarkan hasil perhitungan atas dasar harga berlaku tahun 1983 masing-masing sumbangannya terhadap PDRB Maluku ialah: Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 13,82%; Kabupaten Maluku Tengah sebesar 30,49%; Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 9,18%; Kabupaten Maluku Utara sebesar 27,78%; dan Kotamadya Ambon sebesar 18,73%. Adapun perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 1975, tahun 1983 adalah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 13,96%; Kabupaten Maluku Tengah sebesar 31,51%; Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 11,50%; Kabupaten Maluku Utara sebesar 25,52% dan Kotamadya Ambon sebesar 17,51%.

Pendapatan per kapita masing-masing Kabupaten/Kotamadya atas harga berlaku pada tahun 1983, pendapatan regional perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar Rp 471.284,- disusul Kotamadya Ambon sebesar Rp 405.628,-; Maluku Tengah sebesar Rp 326.908,-; Maluku Utara sebesar Rp 311.979,- dan Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp 271.5009,-. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan pendapatan regional perkapita pertahun secara riel berdasarkan perhitungan atas dasar harga konstan tahun 1975 selama Pelita III yang tertinggi terjadi di Kotamadya Ambon yaitu sebesar 7,44%. Disusul kemudian oleh Kabupaten Maluku Tengah sebesar 7,20%, Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 7,20%, Kabupaten Maluku Utara sebesar 2,36% dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 2,14%. Lihat Tabel III-1 dan III-2.

Kegiatan berbagai sektor pembangunan bidang ekonomi di Dati I Maluku dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pertanian

a. Tanaman Pangan

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan selama Pelita I sampai dengan Pelita III dipusatkan pada usaha-usaha peningkatan produksi, terutama produksi bahan makanan non beras dalam usaha pemenuhan karbohidrat dan gizi.

Jenis komoditi pertanian tanaman pangan di Propinsi Dati I Maluku untuk karbohidrat (jagung, ubi kayu, ubi jalar, padi sawah, padi ladang dan umbi-umbian). Sedangkan protein nabati terdiri (kacang tanah,

THE REALIZATION of develoment in the economic filed in the province of Moluccas since Pelita I till Pelita III from the points of view of various sectors, show favourable results.

The economic speed growth in the province of Moluccas in the year 1984 is as big as 7,5% according with the increase of PDRB based on the constant price of the year 1975, from the year 1983 with the amount of Rp191.190.410 million to the year 1984 with the amount of Rp205.555,782 million. In the year 1979 the Regional Gross Domestic Product (PDRB) in the Moluccas based on the constant price of 1975 is Rp 140.387,560 million has increased to Rp205.555,782 million in the year 1984. The avarage increase of the enomic growth every year (within the period of 1979 - 1984) as big as 7,92%.

The sectors undergoing increase in the year 1984 are the sectors on agriculture as big as 34,79%; the sector on electricity and fresh water as big 5,77% ; sector of trade and commerce as big as 22,32%; sector transportation and communication as big as 2,62% ; the banking and other financial sectors as big as 39,37% ;the sector of housing rents as big as 2,69% sector of public administration and defence as big as 6,04%, and sectors of service as big as 3,26%. In the other hands, the sector of mining and digging, and sector of construction/buildings, both have undergone a decline in the year 1984, namely as big as 17,14% and 5,27%.

From the point of view of the estimation of prices in effect, the Regional Gross Domestic Product of the province of the Moluccas in the year 1984 is as big as Rp629.929 million if compared with the year 1983 is only of the amount of Rp560.820 million, it means there is an increase of 12%. The real increase shown by the increase of regional income per capita based on the constant price of 1975, in the year 1984 is a big as 4,51%. Threal average increase of regional income per capita in the province of the Moluccas every year during the period of 1979 - 1984 as big as 4,12%.

The Regional Gross Domestic Product per district/municipality based on the estimation result based on the constant price of 1975, in the year 1983 each contribution to the Moluccas Regional Gross Domestic Product is : he district of Southeast Moluccas as big as 13,82%; the district of Central Moluccas as big as 30,49%; the district of Central Halmahera as big as 9,18%; the district of North Moluccas as big as 27,78%; and the municipality of Ambon as big as 18,73%. The calculation of the Regional Gross Domestic Products based on the constant price of 1975, in the year 1983 is as big as : the district of Southeast Moluccas as big as 13,69%; the district of Central Moluccas as big as 31,51%; the district of Central Halmahera as big as 11,50%; the district of North Moluccas as big as 25,5%, and the municipality of Ambon as big as 17,51%.

The income per capita of each district/municipality based on the effective price in 1983, the income per capita which is the highest, is found in the distric of Central Halmahera, namely as big as Rp471.284; Next followed by the municipality 980; North Moluccas as big as Rp311.979; and the district of Southeast Moluccas as big as Rp271.500; Il average speed growth of regional income per capita per year in reality based on the constant price of the year 1975 during Pelita III, the highest point is found in the municipality of Ambon, namely as big as 7,44%. Next followed by the Central Moluccas district as big as 7,2%, the Southeast Moluccas district as big as 7,20%; the North Moluccas district as big as 2,36% and the district of Central Halmahera as big as 2,14%. See Table III — 1 and III — 2

Activities in various economic sectors in the development of the province of Moluccas can be expounded as follows:

1. Agriculture

a. Foodstuff Crops.

Agricultural development concerning foodstuff crops during Pelita I till Pelita III is concentrate in the efforts to enhance production, especially non-rice foodstuff products in the efforts to fulfill the carbohydrate and nutrition.

The types of commodities of agricultural foodstuff crops in the province of Moluccas for carbohydrate : maize corn, cossava, sweet potatoes, wet ricefields' paddy, dry ricefields' paddy, and tuber and yam group, while the vegetative protein consisting of peanuts, soyabeans, small green peas, and other beans family. Nutrition consists of vegetable and fruits.

Tabel / *Table III — 2*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI MALUKU MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1975 TAHUN 1979 — 1984 (RIBUAN RUPIAH)

	Uraian *Explanation*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian/*Agriculture*	68.351.464	80.237.307	75.141.385	79.394.099	80.234.403	85.360.875
	- Tanaman Bahan Makanan/ *Foodstuff crops*	23.659.054	28.985.759	28.250.527	29.715.327	30.162.158	30.337.203
	- Tanaman Perkebunan/ *Plantation crops*	17.371.193	16.913.633	19.786.352	20.286.026	20.953.052	22.905.248
	- Peternakan/*Animal husbandry*	1.150.384	1.193.382	1.363.208	1.484.502	1.669.609	1.625.732
	- Perikanan/*Fishery*	15.964.449	17.338.615	18.026.234	19.368.701	20.549.255	23.045.059
	- Kehutanan/*Forestry*	10.206.384	15.805.918	7.715.064	7.539.543	6.900.329	7.447.633
2.	Pertambangan/Penggalian/ *Mining / Digging*	10.642.031	12.358.859	14.367.306	14.059.673	11.047.486	9.154.149
3.	Industri/*Industry*	1.104.900	980.606	1.204.321	1.244.989	4.752.854	6.406.411
4.	Listrik dan Air Minum/ *Electricity and Drinking Water*	269.930	177.252	187.090	193.629	229.416	242.643
5.	Bangunan/Konstruksi/ *Buildings/Construction*	7.123.009	10.744.826	15.645.351	17.427.284	18.181.347	17.249.582
6.	Perdagangan/ *Trade and Commerce*	22.431.174	25.495.821	25.199.699	29.246.854	33.532.636	41.018.574
7.	Pengangkutan & Komunikasi/ *Transportation and Communication*	8.320.611	8.454.350	10.103.281	12.845.756	12.891.358	13.229.246
8.	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/*Banking and other financial institutions*	1.097.650	1.072.755	1.821.912	2.520.053	2.623.170	3.934.671
9.	Sewa Rumah/*Housings rent*	3.211.696	3.306.141	3.657.819	3.756.715	3.857.080	3.961.013
10.	Pemerintahan & Pertahanan/ *Public administration and defence*	15.841.363	20.392.159	21.440.934	22.487.722	21.102.800	22.377.958
11.	Jasa-jasa/*Services*	1.993.732	1.915.258	1.995.261	2.228.891	2.537.860	2.620.660
	Produk Domestik Bruto *Gross Domestic Product*	140.387.560	165.135.334	170.764.359	184.405.665	191.190.410	205.555.782

Tabel / *Table III — 1*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROPINSI MALUKU MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 1979 — 1984 (RIBUAN RUPIAH)
BASED ON THE EFFECTIVE PRICE IN THE YEAR 1979 — 1984 (RP THOUSAND)

No.	Uraian *Explanation*	1979	1980	1981	1982	1983	1984
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian/*Agriculture*	174.926.715	203.303.425	209.556.493	232.955.450	254.410.785	279.407.451
	- Tanaman Bahan Makanan/ *Foodstuff Crops*	61.110.408	76.275.153	81.493.169	101.517.298	108.496.619	114.161.671
	- Tanaman Perkebunan/ *Plantation crops*	56.416.177	44.384.467	51.118.710	52.336.489	57.075.959	60.606.835
	- Peternakan/*Animal husbandry*	4.434.820	6.146.470	7.191.363	8.022.778	10.355.435	10.446.328
	- Perikanan/*Fishery*	25.969.787	25.430.760	30.433.605	31.907.346	34.133.342	43.406.605
	- Kehutanan/*Forestry*	26.995.523	51.066.575	39.319.646	39.171.539	44.349.430	50.786.012
2.	Pertambangan/Penggalian/ *Mining/Digging*	18.982.578	27.802.869	28.723.656	24.385.242	27.912.987	20.870.458
3.	Industri/*Industry*	2.949.203	2.762.774	3.915.064	4.395.186	19.425.090	28.798.352
4.	Listrik dan Air Minum/ *Electricity and Drinking Water*	328.107	274.917	345.249	455.276	843.351	1.030.815
5.	Bangunan/Konstruksi/ *Buildings/Construction*	11.113.320	20.375.414	30.351.981	36.945.843	42.660.158	13.406.629
6.	Perdagangan/*Trade and Commerce*	50.754.559	63.043.582	65.209.831	78.546.828	108.050.399	135.575.287
7.	Pengangkutan & Komunikasi/ *Transportation and Communication*	18.299.917	18.651.483	20.604.133	27.676.679	30.390.080	31.512.960
8.	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya/*Banking and other financial institutions*	2.099.216	2.631.275	4.242.080			
9.	Sewa Rumah/*Housings rent*	4.826.842	5.506.921	6.253.774	7.304.181	8.399.177	9.876.754
10.	Pemerintahan & Pertahanan/ *Public administration and defence*	25.990.923	34.913.115	38.812.379	44.725.047	51.134.193	56.141.822
11.	Jasa-jasa/*Services*	3.346.153	3.351.027	3.537.354	5.888.638	8.743.680	9.498.486
	Produk Domestik Regional Bruto/ *The Regional Gross Domestic Products*	313.617.533	380.616.802	411.551.994	468.795.166	560.820.897	629.929.846

kacang kedele, kacang hijau, kacang-kacangan lain). Dan gizi terdiri dari sayur-sayuran serta buah-buahan.

Perkembangan pertanian tanaman pangan selama Pelita III menunjukkan, komoditi jagung, padi sawah, dan sayur-sayuran tercatat kenaikan luas arealnya, sedangkan komoditi lainnya terjadi fluktuasi dan perkembangan luas areal yang cenderung menurun. Lihat Tabel III-3.

Begitu pula angka produksi mengalami peningkatan pada jagung, padi sawah, sayur-sayuran dan buah-buahan, sedangkan produksi

The development of agriculture on foodstuff crops during Pelita III shows increase i the areal of maize corns wet ricefields paddy, and vegetables, while other commodities undergo fluctuations and development of areals having the tendency of declining. See Table III – 3

The same case is it with the production rate. It undergoes increase, especially maize corns, wet ricefields' paddy, vegetables and fruits, while the other foodstuff crops products undergo fluctuations. THis is due to among others the existence of plants pest/disease which directly not yet being able to be overcome by the farmers continually. Besides that is shoud be recognized situa-

Tabel / *Table III — 3*

PERKEMBANGAN LUAS AREAL DAN LUAS PANENAN TANAMAN PANGAN SELAMA PELITA III
FOOD CROPS PLANTING AREA AND HARVEST AREA DURING PELITA III

(Dalam Ha)

No Jenis Komodity *Commodity*	PELITA III				
	1978	1979	1980	1981	1982
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Karbohidrat/*Carbohydrate*					
1. Jagung/*Maize*	20.800	19.919	20.589	20.644	22.277
	18.909	18.108	18.717	18.767	18.252
2. Ubi Kayu/*Cassava*	18.529	16.570	18.285	13.893	17.049
	16.838	15.064	16.805	12.630	15.499
3. Ubi Jalar/*Sweet potato*	9.741	9.733	7.209	10.707	8.390
	8.855	8.848	6.545	9.734	7.628
4. Padi Sawah/*Irrigated land paddy*	560	646	671	560	678
	509	587	610	509	616
5. Padi Ladang/*Arid land paddy*	24.200	22.207	16.311	28.222	14.815
	22.000	19.601	14.828	25.656	13.468
6. Umbi-umbian Lain/*Edible roots*	7.599	7.607	9.705	7.528	8.340
	6.908	6.915	8.823	6.844	7.582
II. Protein Nabati/*Plant protein*					
1. *Kacang Tanah/peanuts*	2.654	2.764	2.159	3.539	1.717
	2.413	2.513	1.942	3.217	1.561
2. Kacang Kedele/*Soy-bean*	186	185	33	241	134
	169	168	30	219	104
3. Kacang Hijau/*Small green peas*	34	3.152	1.965	2.896	1.785
	31	2.865	1.786	2.633	1.623
4. Kacang-kacangan lain/*other nuts*	1.675	1.673	485	1.650	1.612
	1.339	1.521	441	1.500	1.465
III. Gizi/*Nutrition*					
1. Sayur-Sayuran/*Vegetables*	1.473	2.544	3.652	3.652	3.743
	1.339	2.313	3.320	3.320	3.403
2 Buah-buahan/*Fruits*	13.770	14.595	13.434	12.132	12.434
	12.518	13.268	12.213	11.029	11.304

Luas Areal /*planting area* Luas Panenan /*harvest area*

tanaman pangan lainnya mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan antara lain, karena adanya serangan hama/penyakit yang secara langsung belum dapat diatasi oleh petani secara terus menerus. Disamping itu harus pula diakui bahwa dengan terbatasnya tenaga serta keadaan geografis menyebabkan penanggulangan serangan hama dengan cepat belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Lihat Tabel III-4.

Bila dilihat dari produksi per satuan luas (Ha) panen, maka perkembangannya tidak konstan, namun ada kencenderungan naik per satuan luas. Disamping jenis-jenis komoditi tanaman pangan tersebut terdapat pula sumber karbohidrat lain yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam memenuhi keperluan karbohidrat penduduk/masyarakat antara lain: sagu, pisang dan sukun.

Potensi **sagu tercatat seluas ± 5.163,1 Ha dengan produksi rata-rata per tahun 68,411 ton ekivalen beras, sehingga kemampuan produksi per Ha adalah 1,3 ton/Ha.**

Tanaman **sagu belum dibudidayakan. Menurut angka terakhir tercatat luas hutan/ladang sagu diperkirakan hampir dua kali dari angka yang diketahui yaitu pada tahun 1982 seluas 51.631 Ha.**

Luas **areal tanaman pisang tercatat sebesar 4.399 Ha dengan produksi sebanyak 20.201 ton ekivalen beras atau kemampuan produksi per Ha adalah 4,6 ton/Ha. Sedangkan untuk tanaman sukun baik luas areal maupun produksinya memberi harapan untuk terus dikembangkan lebih lanjut.**

Keadaan pangan dan gizi penduduk Maluku dibandingkan dengan konsumsi tingkat nasional pada tahun 1976 dan 1980 tercermin dalam Neraca Bahan Makanan menunjukkan pada tahun 1979 konsumsi kalori untuk tingkat nasional sebesar 2.331 dan pada tingkat Maluku sebesar 2.000, kemudian meningkat pada tahun 1980 meningkat menjadi 2.442 tingkat konsumsi kalori nasional, dan 2.180 pada tingkat kalori Maluku. Sedangkan protein pada tahun 1979 untuk tingkat nasional sebesar 43,7 gram, pada tingkat Maluku sebesar 40,9 gram. Tahun 1980 menjadi 47,0 gram pada tingkat nasional dan 48,2 gram untuk tingkat Maluku. Adapun lemak pada tahun 1979 untuk tingkat nasional mencapai 30,6 gram, dan pada tingkat Maluku sebesar 35,2 gram. Pada tahun 1980 konsumsi lemak untuk tingkat nasional sebesar 46,8 gram dan untuk tingkat Maluku sebesar 40,5 gram.

tion cases the overcoming of the plants pest quickly cannot be done according to the axpectation. See Table III – 4

Tabel / *Table III — 4*

PERKEMBANGAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN SELAMA PELITA III
FOOD CROPS PRODUCTION DURING PELITA III

(Dalam ton)

No Jenis Komodity *Commodity*	PELITA III				
	1978	1979	1980	1981	1982
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karbohidrat / *Carbohydrate*					
1. Jagung/*Maize*	19.060	18.072	21.570	24.638	26.224
2. Ubi Kayu/*Cassava*	163.229	141.602	146.640	109.881	141.041
3. Ubi Jalar/*Sweet potato*	60.214	60.166	47.026	64.244	55.681
4. Padi Sawah/*Irrigated land paddy*	1.166	1.544	1.769	1.211	2.520
5. Padi Ladang/*Arid-land paddy*	19.646	20.444	22.598	26.477	21.010
6. Umbi-umbian/*Edible roots*	42.917	43.242	58.380	39.633	39.355
Protein Nabati/*plant protein*					
1 *Kacang Tanah/peanuts*	1.332	1.422	1.672	2.233	1.186
2. Kacang Kedele/*soy-bean*	99	97	73	136	60
3. Kacang Hijau/*Small-green peas*	1.563	1.433	821	1.314	812
4. Kacang-Kacangan lain/*other nuts*	767	705	253	759	732
III. G i z i / *Nutrition*					
1. Sayur-Mayur/*Vegetables*	10.539	10.809	15.091	15.091	15.723
2. Buah-buahan/*Fruits*	61.926	63.524	68.392	41.882	63.302

If seen from the production per units/ha of the harvet, then the development is not constant, but ther is a tendency of increase of quantity units/ha. Except those types of foodstuffs commodities there are also found other sources of carbohydrate which have great significance in fulfilling the needs of the population carbohydrate/the society, namely among other, sago flour, bananas, and bread fruits.

The sago potentiality is recorded as wide as about 5.163,1 ha with the average annual production as much as 68,411 ton equivalent to rice, so that the capacity of production per ha is 1.3 ton per ha.

The areal covering banana plants is recorded to be 4.399 ha with the products as much as 20.201 ton equivalent to rice, or the production capacity per ha is 4,6 ton per ha. For the bread fruits areal and the production of it, it gives much prospects for further production.

The foodstuff and nutritions condition of the population of Moluccas compared to the national consumption in the year 1976 and 1980, is reflected in the Foodstuff Balance, showing in the year 1979 the calorie consumption for the national level as muach as 2.331 while on the level of Moluccas province as big as 2000. Later in the year 1980 it increase to 2.442 for the national consumption of calorie while on the level of Moluccas province it is 2.180. For the protein in the year 1979 on the national level is as much as 43,7 gram, while on the provincial level of the Moluccas as big as 40,9 gram. In the year 1980 becomes 47,0 gram on the national level, and 48,2 gram for the provincial level of the Moluccas. Concerning the fat in the year 1979 for the national level reaches 30,6 gram, while on the provincial level reaches 35,2 gram. In the year 1980 the consumption of fat for the national level is as big as 46,8 gram, while on the provincial level of the Moluccas as big as 40,5 gram.

It is clear that the calorie consumption, protein and fat in the Moluccas have undergone increase if compared with the year 1976 In the year 1980 for the calorie is recorded an increase of 9%, protein 17,85, for the fat 15,06%. Nonetheless if compared with the national standar in the year 1980 only the protein is bigger in number, namely 2,55% bigger, while for the calorie and fat each has reached 89,27% and 86,53%.

From the data available it turns out that the consumption of vegetative protein is still far from the target decided before. Nevertheless the contribution of veterinary protein originating from the fishes is far exceeding the stipulated standard, namely in the year 1979 as big as 43,4 kg, in the year 1980 as big as 44,4 kg, in the year 1981 as big as 45,3 kg, and in the year 1982 as big as 47,1 kg. While the average consumption of fishes per capita per year as big as 29,5 kg.

The calorie consumption originatinig from the source of carbohydrate like the secondary crops, sago,rica and bananas, are quite sufficient. The needs of carbohydrate per capita kg equivalent of rice per capita. See Table III – 5

The data shown that in the year 1982 the sago plays an important role in the supply of carbohydrate, namely as much as 26,18%, followed by tuber and yam group plants as much as 24,98%, maize corn 22,9%, bananas

Nampak bahwa konsumsi kalori, protein dan lemak di Maluku mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 1976. Tahun 1980 untuk kalori tercatat kenaikan sebesar 9%, untuk protein 17,85%, untuk lemak 15,06%. Namun bila dibandingkan dengan standar nasional pada tahun 1980 hanya protein 2,55% lebih besar, sedangkan untuk kalori dan lemak masing-masing baru mencapai 89,27% dan 86,53%.

Dari data yang ada ternyata konsumsi protein nabati masih jauh dari target yang ditentukan. Namun sumbangan protein hewani yang berasal dari ikan jauh melampaui standar yang ditetapkan yaitu pada tahun 1979 sebesar 43,4 Kg, tahun 1980 sebesar 44,4 Kg, tahun 1981 sebesar 45,3 Kg, dan pada tahun 1982 sebesar 47,1 Kg. Sedangkan rata-rata konsumsi ikan perkapita per tahun sebesar 29,5 Kg.

Konsumsi kalori yang berasal dari sumber karbohidrat seperti palawija, sagu, beras dan pisang, cukup memadai. Adapun kebutuhan karbohidrat per kapita di Maluku telah melampaui standar nasional yaitu 165 Kg ekivalen beras per kapita. Lihat Tabel III-5.

Tabel / *Table III — 5*

KONSUMSI BAHAN PANGAN UTAMA (KARBOHIDRAT)
PER KAPITA PER TAHUN DI MALUKU
THE COMMUNICATION OF MAIN FOODSTUFF (CARBOHYDRATE)
PER CAPITA PER YEAR IN THE MOLUCCAS

(Dalam Kg ekivalen beras) / *(In the equivalent of rice)*

No	Komoditi *Commodity*	1976	1980	1982	Keterangan *Note*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Umbi-umbian/ *Tuber and yam group plants*	66.31	59.65	48.75	
2.	Jagung/*Maize corns*	14.23	15.44	44.75	
3.	Beras/*Rice*	7.77	8.65	7.95	
4.	S a g u/*Sago*	51.09	51.09	51.09	
5.	Pisang/*Bananas*	33.53	39.48	42.56	
	Jumlah / *Total*	172.93	174.31	195.12	

Dari data menunjukkan bahwa pada tahun 1982 sagu memegang peranan utama dalam pemenuhan karbohidrat yakni sebesar 26,18%, diikuti oleh umbi-umbian sebesar 24,98%, jagung 22,94%, pisang 21,82% dan beras sebesar 4,08%. Gambaran ini menunjukkan bahwa Propinsi Daerah Tingkat I Maluku sudah dapat memenuhi keperluan minimum akan karbohidrat, namun bila dikaji lebih jauh per region/Kecamatan. Ada wilayah yang surplus tetapi ada juga Kecamatan-kecamatan yang tergolong sangat rawan berdasarkan produktivitas usaha dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

Keperluan akan karbohidrat per kapita pada akhir Pelita III telah mencapai 195,12 Kg ekivalen beras dan 15,22% diatas target nasional. Namun bila disimak mengenai penyebarannya maka ada beberapa daerah yang dikatagorikan sangat rawan sebagai akibat keterbatasan sumber alam, belum sesuainya pembudidayaan tanaman pangan dengan kondisi lahan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah serta sarana penunjang yang masih belum memadai dan sebagainya. Hal ini juga terjadi dan berlaku pada pemenuhan protein, mineral vitamin dan lain-lain.

Salah satu masalah pokok yang perlu mendapat pemecahan secara mendesak adalah keperluan pangan, terutama menyangkut meratanya tingkat pemenuhan karbohidrat serta usaha pemenuhan protein, mineral, vitamin dan lain-lain, dalam mencapai standar gizi optimum baik yang berasal dari tanaman pangan, peternakan maupun perikanan.

Hal lain yang dianggap penting adalah bagaimana mempertahankan keperluan karbohidrat dari tanaman pangan non beras, karena hal ini lebih sesuai dengan kemampuan lahan serta kondisi geografis daerah, disamping kurangnya keterpaduan rencana pembuatan jaringan pengairan antara dinas, instansi, satuan kerja setempat.

Berkaitan dengan hal tersebut, masalah keamanan sistem pengairan memerlukan pemikiran yang matang guna tercapainya efisien baik biaya, tenaga dan waktu.

b. Pengairan

Pembangunan pengairan di Propinsi Dati I Propinsi Maluku bertujuan untuk menunjang pembangunan sub sektor pertanian pangan, khususnya dalam pembangunan persawahan yang dikaitkan dengan program transmigrasi dan pembangunan perikanan air tawar. Selain itu dalam usaha pendayagunaan air dan pengembangan sumber-sumber air, pengairan mempunyai peranan dalam pembangunan industri, pem-

21,82% and rice 4,08%. This situation shows that the province of Moluccas has been able to supply its necessities on carbohydrate on minimal needs, but if we analyse further per region/subdistrict there are regions with surplus but there are also subdistrict classified as critical based on the enterprise productivity in comparison with the total amount of population in the region concerned.

The necessities for carbohydrate per capita at the end of Pelita III as reached 195,12 kg equivalent with roca and 15,22% above the national target. But if we analyze about the distribution, there are some regions which are categorized as critical as the result of the shortage of natural resources, not yet adequate of the aculturation of foodstuff crops with the existing ricefield condition of each region, and the sustaining means which are not yet adequate, etc. This fact in also taking place and is efective in the supply of protein, mineral, vitamins, etc.

One of the main problem that should have to be solved inurgent condition is the need for food, especially in relationship with the equitable distribution of carbohydrate supply and the efforts to provide protein, mineral, etc, in achieving the nutritional optimum standard, either originating from the foodstuff crops, animal husbandry, or fishery.

Other matters which are considered important are how to maintain the supply of carbohydrate from the foodstuff crops of non-rice types, because this fact is more adjustable to the capacity and geographical condition, besides the shortage of integrated planning of irrigation system between the services, institutions, and the local working units.

In close relationship with the matter mentioned above, the security problems on the irrigation system, needs mature thingking to achieve efficiency either in manpower, expense, and time necessary.

b. Irrigation

The irrigation development in the province of Moluccas hads the aim of sustaining the development in the subsector of foodstuff agriculture, especially in the development of rice fields which is connected with the transmigration development and the development of fresh water fishery.

Besides that in the efforts to utilize the water and improvement of water resources, the irrigation plays an important role in the industrial development, electric power generator, household necessities, health, education, and some other life aspects.

As we already know that the consumption pattern in the Moluccas up till now is non-rice (sago and secondary crops) therefore the development of foodstuff crops in Pelita IV is aimed on the acceleration of products in the efforts to improve the food standard especially foodstuff of non-rice (secondary crops, horticulture, and sago. For this purpose the building up of new irrigation system in Moluccas, especially in the location of the transmigration to fulfill the water needs for the ricefields.

The development or irrigation construction during Pelita III can be described as follows :

1). The areal of wet ricefield is 10.296 ha.
2). The wide areal with potentian level reaches 10.211 ha.
3). The wide areal with functional irrigation is 590 ha, and that is not yet turned into ricefield is 962 ha. See Table III-6.

The development of ricefield provision during Pelita III, can be pictured as follows : (1) The irrigation areal is 2.819 ha; (2) The areal of ricefileds dependent upon rain in the irrigation area is 1.905 ha ; (3) The areal of ricefield dependent upon rain outside the irrigation area is 46.545 ha.

See Table III-7

c. Animal Husbandry

The province of Moluccas is in the possession of natural resources which is great enough to be developed, namely animal husbandry. Especially cattle breeding of ruminancias, because besides it has the areal of potential agricultura, also the advantageous of plantation areal still give great opportunities.

The animal husbandry in the Moluccas in general is still managed traditionally which is daily done without taking care of technical and economical aspects, except in the breeding of race chickens is oriented to the commercial enterprise.

In Pelita III the development of animal husbandry shows a result of favourable prospect. This fact is seen from the more and more increasing of the population all types of animals, except buffaloes. Of the animal population target during Pelita II it turns out that the cow breeding and horss breeding are developing exceeding the target decided upon.

During Pelita III the population of big animals such as cows, horses, increase the average of 10% and 15% per year, while the buffaloes breeding undergoes decline 6% per year. For small catle such as goats, pigs, and sheep undergo

bangkit tenaga listrik, keperluan rumah tangga, kesehatan, pendidikan dan beberapa aspek kehidupan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pola konsumsi di Maluku selama ini adalah non beras (sagu dan palawija), oleh sebab itu pembangunan pertanian tanaman pangan dalam Pelita IV, ditujukan pada peningkatan produksi dalam usaha perbaikan mutu makanan, terutama tanaman pangan non beras (palawija, holtikultura dan sagu). Untuk itu pembangunan irigasi baru di Maluku terutama di lokasi-lokasi transmigrasi untuk memenuhi keperluan air bagi daerah-daerah persawahan.

Perkembangan pembangunan pengairan selama Pelita III dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Luas areal lahan baku (lahan basah) adalah 10.296 Ha;
(2) Luas areal dengan tingkat pengairan potensial, mencapai adalah 10.211 Ha;
(3) Luas areal dengan pengairan fungsional, seluas 590 Ha dan yang belum disawahkan 962 Ha. Lihat Tabel III-6.

Tabel / *Table III — 6*

PERKEMBANGAN REALISASI LUAS AREAL IRIGASI DI MALUKU SAMPAI AKHIR PELITA III (Ha)
THE REALIZATION DEVELOPMENT OF IRRIGATION AREAL IN THE MOLUCCAS TILL THE END OF PELITA III (HA)

No	Kabupaten / *District* Daerah Irigasi *Irrigation Region*	Realisasi Luas (Ha) / *Areal of Realization (Ha)* Buku *Raw Areal*	Potensi *Potentiality*	Fungsional (ST) *Functional (ST)* SS *SS*	BS *BS*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Maluku Utara/*North Moluccas*				
1.	D.I. Daco/P. Morotai/ *Irrigation area of Dayo/island of Morotai*	322	322	30	292
2.	D.I. Tiley/P. Morotai/ *Irrigation areal of Tiley/island of Morotai*	427	427	—	—
3.	D.I. Kao/P. Halmahera/ *island of Halmahera*	1.200	1.115	—	—
	Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	—	—	—	—
	Maluku Tengah/ *Central Moluccas*				
1.	D.I. Kairatu/P. Seram/ *Irrigation areal of Kairatu/island of Seram*	885	885	530	355
2.	D.I. Kairatu/P. Seram/ *Irrigation areal of Kairatu/island of Seram*	345	345	30	315
3.	D.I. Kairatu/P. Seram/ *Irrigation areal of Kairatu/island of Seram*	187	187	—	—
	Pulau Buru/ *The island of Buru* :				
	- Wai Bini	345	345	—	—
	- Wai Tele	467	467	—	—
	- Wai Meten	1.382	1.382	—	—
	- Wai Geren	926	926	—	—
	- Wai Lata	1.322	1.322	—	—
	- Wai Lo	903	903	—	—
	- Wai Leman	955	955	—	—
	- Wai Apu	630	630	—	—
	Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	—	—	—	—
	Jumlah / *Total*	10.296	10.211	590	962

Catatan / ***Note :***
SS : Sudah ada Sawah / ***Already provided with wet ricefields.***
BS : Belum ada Sawah / ***Not yet provided with wet ricefield.***
ST : Sudah ada Tersier / ***already provided with tertiary system.***

Perkembangan pengadaan sawah selama Pelita III, dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Luas areal irigasi tercatat 2.819 Ha; (2) Luas sawah tadah hujan di daerah irigasi adalah 1.905 Ha; (3) Luas sawah tadah hujan di luar daerah irigasi adalah 46.545 Ha. Lihat Tabel III-7.

c. Peternakan

Propinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memungkinkan untuk pengembangan peternakan, terutama ternak

Tabel / ***Table III — 7***

PERKEMBANGAN JENIS SAWAH DI MALUKU SAMPAI AKHIR PELITA III
DEVELOPMENT OF RICEFIELDS TYPES IN THE MOLUCCAS TILL THE END OF PELITA III

No	Kabupaten Daerah Irigasi *District Irrigation Area*	Sawah Irigasi *Irrigation Ricefields*	Sawah tadah hujan di daerah irigasi *Ricefields dependent upon rain in the iriigation area*	Sawah tadah hujan di luar daerah irigasi *Ricefields dependent upon rain outside the irrigation area*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Maluku Utara/ *North Moluccas*			
1.	D.I. Daco/P. Morotai/ *Irrigation area of Dayo/island of Morotai*	30	—	10
2.	D.I. Tiley/P. Morotai/ *Irrigation area of Tiley/island of Morotai*	100	20	—
3.	D.I. Kao/P. Halmahera/ *Irrigation area of Kao/island of Halmahera*	—	25	—
4.	Daerah Tersebar/ *Scattered area*	—	12.235	—
	Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*			
	Lahan Tersebar/ *Scattered dry ricefields*	—	9.500	—
	Maluku Tengah/ *Central Moluccas*			
1.	D.I. Kairatu/P. Seram/ *Irrigation area of Kairatu I/island of Seram*	530	—	—
2.	D.I. Kairatu/P. Seram/ *Irrigation area of Kairatu II/island of Seram*	30	—	—
3.	D.I. Kairatu/P. Seram/ *Irrigation area of Kairatu/island of Seram*	57	—	—
4.	Pulau Buru : *The island of Buru*			
	- Wai Bini	175	—	—
	- Wai Tele	367	—	—
	- Wai Meten	740	—	—
	- Wai Geren	120	403	—
	- Wai Lata	550	272	—
	- Wai Lo	120	327	—
	- Wai Leman	—	508	—
	- Wai Apu	—	350	—
	Lahan Tersebar/ *Scattered dry ricefields*	—	—	15.600
	Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*			
	Lahan Tersebar/ *Scattered dry ricefields*	—	—	9.200
	Jumlah /*Total*	2.819	1.905	46.545

the increase average of 5%, 0,04% and 49% per year, while the breeding of fowls, namely broilers, race chickens, and ducks, has an increase each of 4,3%, 38%, and 11% per year. See Table III–7a

The activities on the supply / import of animal seedlings and the distribution ton the animals farmers is one of the activities that absorb the bigges fund, either from the national revenue and budget or from the regional revenues and budget.

The distribution of Balinese cows is done in the areas of subdistricts which is to be taken care by the farmers of 1.728 persons of cattle breeders. The cattle breeding of Sumba onggol is distributed to 4 subdistrict and given to be taken care of by 227 farmers. While the cattle of drought master is distributed to 2 subdistricts and to be taken care by 682 transmigrant farmers and 78 local farmers. See Table III–8

The distribution of goats seedlings are done in 9 subdistricts and given to be taken care of by 280 persons, while the pig farming is distributed to 13 subdistricts and given to be taken care of by 260 farmers. The distribution of chickens seedlings of eggs producing chickens (through demplot packages) is limited in the municipal area, namely in the vicinity of Ambon, Masohi and Ternate, with the amount of cattle breeders of 140 farmers.

Since Pelita III the efforts on development of regreening of cattle food is begun by the creating of seedlings garden as wide as 10 ha which is up

ruminansia, disebabkan selain memiliki areal pertanian potensial juga pemanfaatan areal perkebunan masih memberikan kemungkinan yang besar.

Usaha peternakan di Maluku pada umumnya masih dikelola secara tradisional yang sehari-hari belum dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis maupun ekonomis, kecuali usaha peternakan ayam ras sudah mengarah pada bentuk perusahaan yang bersifat komersial.

Dalam Pelita III perkembangan peternakan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat kian meningkatnya populasi semua jenis ternak, kecuali ternak kerbau. Dari target populasi ternak selama Pelita III ternyata ternak sapi dan kuda perkembangannya melampaui target yang ditetapkan. Lihat Tabel III-7a.

Selama Pelita III populasi ternak besar seperti sapi, kuda meningkat rata-rata dengan 10% dan 15% per tahun, sedangkan ternak kerbau mengalami penurunan 6% per tahun. Untuk ternak kecil seperti kambing, babi dan domba mengalami kenaikan rata-rata 5%, 0,04% dan 49% per tahun, sedangkan ternak unggas yaitu ayam sayur, ayam ras dan itik kenaikannya masing-masing 4,3%, 38% dan 11% per tahun.

Kegiatan pengadaan/pemasukan bibit ternak dan penyebarannya kepada petani peternakan, merupakan salah satu kegiatan yang menyerap dana pembangunan terbesar, baik yang bersumber dari APBN maupun dari APBD. Lihat Tabel III-8.

Penyebaran sapi Bali dilakukan pada wilayah Kecamatan dan digaduhkan kepada 1.728 orang petani peternak. Ternak sapi Sumba Onggol disebarkan pada 4 Kecamatan dan digaduhkan pada 227 orang. Sedangkan sapi Droughtmaster disebarkan pada 2 Kecamatan dan digaduhkan pada 682 petani transmigran dan 78 orang petani setempat.

Penyebaran bibit ternak kambing dilakukan pada 9 Kecamatan dan digaduhkan kepada 280 orang, sedangkan ternak babi telah disebarkan pada 13 Kecamatan dan digaduhkan pada 260 orang. Penyebaran bibit ayam petelur (melalui paket demplot) terbatas di daerah perkotaan, yaitu sekitar kota Ambon, Masohi dan Ternate dengan jumlah peternak 104 orang.

Sejak Pelita III usaha pengembangan hijauan makanan ternak mulai dilakukan melalui pengadaan kebun bibit hijauan makanan ternak seluas 10 Ha yang sampai kini telah ditanami dengan jenis-jenis rumput unggul seperti Pannisetun purpureum, Brachiara decumbens, Setaria sphacelata, green panic dan rumput lokal (mutica gross). Dalam Pelita III telah dilaksanakan upaya pengembangan hijauan makanan ternak unggul pada daerah-daerah dimana terdapat kegiatan penyebaran ternak serta perbaikan padang pengembalaan seluas 100 Ha.

Propinsi Maluku adalah daerah yang praktis bebas dari kebanyakan penyakit hewan menular. Walaupun demikian pengendalian penyakit tetap mendapat perhatian yang layak. Dalam Pelita III melalui berbagai proyek telah diadakan pengadaan vaksin ND sebanyak 1.421.900 dosis, vaksin SE sebanyak 21.600 dosis dan obat-obatan sebanyak 37.250 dosis.

Produksi daging selama Pelita III meningkat dari 1.512.818 Kg menjadi 1.754.269 Kg atau naik rata-rata 3,8% per tahun. Prosentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase laju pertumbuhan penduduk Propinsi Maluku (2,89%). Lihat Tabel III-9.

Konsumsi daging per kapita per tahun selama Pelita III di Maluku berkisar antara 1,10 Kg - 1,15 Kg, dimana kenaikan rata-rata setiap tahun relatif rendah yaitu hanya sebesar 0,9%. Target konsumsi daging per kapita tiap tahun yang ditetapkan dalam Pelita III lebih tinggi dari realisasi yang dicapai. Rendahnya konsumsi daging per kapita selain karena persediaan hewan potong sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, juga karena konsumsi yang lebih berat pada ikan.

Selama Pelita III produksi telur terus meningkat dari 15.519.700 butir pada tahun 1979, kemudian meningkat menjadi 29.556.552 butir pada tahun 1983 atau rata-rata sebesar 17,5%. Lihat Tabel III-10.

Konsumsi telur per kapita selama Pelita III naik rata-rata 14,13% per tahun, sedangkan kenaikan konsumsi telur per kapita belum mencapai target yang ditetapkan dalam Pelita III. Namun prosentase rata-rata kenaikan konsumsi yang dicapai dari tahun ke tahun selama Pelita III adalah sebesar 14,13%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata target yaitu sebesar 9,63%.

d. Perikanan

Propinsi Daerah Tingkat I Maluku memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Potensi tersebut diperkirakan mencapai 1,9 juta ton/tahun (standing stock). Dengan memperhatikan kelestariannya, potensi tadi dapat dimanfaatkan hingga pada batas maksimum Sustainable vield sebesar 50% atau sama dengan 0,95 juta ton/tahun. Dibandingkan dengan angka serta prosentase produksi yang telah dicapai sampai dewasa ini, masih terdapat peluang yang cukup besar untuk ditingkatkan.

Menurut **Bleeker** dan **Wallace**, perairan Maluku mengandung kurang lebih 780 jenis ikan, suatu jumlah yang relatif cukup banyak. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan menurut batasan usaha

Tabel / *Table III — 7a*

POPULASI TERNAK SELAMA PELITA III
THE ANIMAL POPULATION DURING PELITA III

No	Jenis Ternak / *Types of Animal*	Populasi Ternak (Ekor) / *Animal Population (tails)* 1979/80	1980/81	1981/83		1983/84
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)
	Ternak Besar/ *Big Animals*	57.187	60.427	58.755	59.658	66.886
1.	Sapi/*Cows*	28.852	31.487	34.740	36.125	42.151
2.	Kuda/*Horses*	2.931	3.439	3.620	4.000	5.151
3.	Kerbau/*Buffaloes*	25.404	25.501	20.395	19.533	19.584
	Ternak Kecil/ *Small Animals*	197.072	206.610	221.648	223.848	230.602
4.	Kambing/*Goats*	130.494	141.540	154.285	155.948	159.713
5.	Babi/*Pigs*	65.508	61.525	62.088	62.632	65.620
6.	Domba/*Sheep*	1.070	5.545	5.275	5.268	5.269
	Ternak Unggas/*Poultry*	1.057.680	1.242.523	1.274.787	1.396.883	1.490.536
7.	Ayam Sayur/*Broilors*	949.183	1.044.460	1.066.135	1.091.502	1.127.182
8.	Ayam Ras/ *Race chickens*	95.711	182.372	191.954	287.677	344.038
9.	Itik/*Ducks*	12.786	15.691	16.698	17.704	19.316

Tabel / *Table III — 8*

JUMLAH PEMASUKAN BIBIT TERNAK DI MALUKU SELAMA PELITA III
THE AMOUNT OF IMPORTED CATTLE SEEDS IN MOLUCCAS DURING PELITA III

(dalam ekor) / *counted by tails*

No.	Jenis Ternak / *Cattle Types*	Tahun / *Year* 1979/80	80/81	81/82	82/83	'83/84	Jumlah / *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sapi Bali/*Balinese cow*	728	690	543	450	1.031	3.442
2.	Sapi Sumba Ongol/ *Sumba onggol cow*	—	—	—	—	500	500
3.	Sapi Drouhtmaster/ *Drought master cow*	—	—	1.612	1.40	—	2.752
4.	Kambing/Goats	—	—	—	—	592	592
5.	Babi/*Pigs*	55	55	110	156	486	
6.	Ayam petelur/d.o.c/ *Eggs producing chickens/d.o.c*	14.500	41.100	62.600	—	—	118.200
7.	Ayam pedaging/d.o.c/ *Meat producing chicken/d.o.c.*	56.000	116.400	99.260	—	—	271.660
8.	Pejantan ayam ras/ *Race chickens*	1.00	1.500	2.000	440	3.000	7.940
9.	Parent Stock Broiler/ *Parentstock broilers*	—	—	—	—	—	500

Tabel / *Table III — 9*

KONSUMSI DAGING PER KAPITA DAN TARGET SELAMA PELITA III
THE MEAT CONSUMPTION PER CAPITA AND TARGET DURING PELITA III

Tahun / *Year*		Jumlah Penduduk / *Population*	Produksi daging (Kg) / *Meat Amount (in kg)*	Konsumsi Perkapita / *Consumption per capita (in kg)*	Target Pelita III / *Target Production*	Realisasi % / *Realization Pelita III*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1979	1.367.890	1.521.818	1,10	2,04	54
2.	1980	1.408.452	1.624.330	1,15	2,24	52
3.	1981	1.431.154	1.567.148	1,10	2,44	45
4.	1982	1.463.260	1.648.574	1,13	2,64	43
5.	1983	1.535.340	1.754.269	1,14	2,84	40

till now has been planted with super quality grass such as Pannisetun purpureum. Brachiara decumbens, Setaria sphacelata, green panic dan local grass (mutica gross). In Pelita III there have been efforts done in cattle food greenings of super quality grass in areas where found cattles being distributed and also improvement of cattle pasture as wide as 100 ha.

The province of Moluccas is a region practically freen from mosth animals epidemic disease. Nonetheless the prevention of disease is taken good care of. In Pelita III there have beenefforts done in the supplying of vaccine ND as

Tabel / *Table III — 10*

KONSUMSI TELUR PER KAPITA DAN TARGET KONSUMSI SELAMA PELITA III
EGGS CONSUMPTION PER CAPITA AND TARGET CONSUMPTION DURING PELITA III

No	Tahun *Year*	Jumlah Penduduk *Population Quantity*	Produksi Telur (butir) *Eggs production (ones)*	Konsumsi Perkapita (butir) *Consumption percapita (ones)*	Target Pelita III (butir) *Target Pelita III (ones)*	Rehabilitasi Terhadap Target (%) *Realization of target*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1979	1.367.890	15.519.700	11,35	16,74	67,8
2.	1980	1.408.452	19.751.500	14,02	18,60	75,4
3.	1981	1.431.154	23.933.400	16,72	20,46	81,7
4.	1982	1.463.260	27.837.800	19,02	22,32	85,2
5.	1983	1.534.340	29.556.552	19,26	24,18	79,6

penangkapan dan budidaya, maka jenis-jenis sumber perikanan dapat dibedakan sebagai sumber penangkapan dan sumber budidaya.

Sumber Penangkapan di laut: jenis-jenis ikan yang ditangkap di perairan laut adalah jenis ikan pelagis, ikan demersal, ikan kerang dan nener bandeng; Jenis-jenis bukan ikan yang termasuk dalam jenis-jenis udang, jenis mutiara, rumput laut, jenis kerang-kerangan, teripang dan sebagainya.

Penangkapan jenis-jenis ikan pelagis yang telah dilakukan secara intensif selama ini adalah jenis ikan cakalang, kembung, layang, dan julung-julung. Penangkapannya pun masih terbatas di perairan sekitar pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, pulau Ternate dan Tidore. Di daerah-daerah perairan lainnya tingkat pengusahaannya masih belum berkembang, misalnya di sekitar pulau Seram, Halmahera, kepulauan Aru, dan sebagainya. Disamping itu, masih terdapat jenis ikan lainnya yang cukup penting yang dapat dimanfaatkan dikemudian hari, yaitu jenis ikan Tuna Besar, Jenis-jenis ikan demersal yang merupakan jenis-jenis penghuni dasar, selama ini sudah banyak diusahakan orang.

Selain jenis-jenis udang (Panacus spp), maka jenis lainnya masih diusahakan secara terbatas. Hal ini disebabkan bukan oleh terbatasnya potensi sumber, tetapi sifat hidupnya, dimana untuk penangkapan memerlukan teknik-teknik tertentu.

Sesuai dengan kondisi perairan Maluku yang merupakan perairan tropis dengan dasar berkarang, maka jenis-jenis ikan karang termasuk ikan hias, terdapat dan tersebar dengan konsentrasi terbanyak di beberapa lokasi tertentu. Hingga dewasa ini pemanfaatan jenis dari sumber ini masih sangat kurang. Sungguhpun demikian sejauh apa yang diketahui, potensi sumber ikan karang ini tidak kalah pentingnya terutama dalam memenuhi konsumsi lokal dan perdagangan antar pulau.

Pada beberapa tahun terakhir ini nener jenis ikan bandeng telah ditemui di beberapa lokasi di perairan Maluku, antara lain sekitar pulau Ternate, pesisir Utara Seram Barat, teluk Makariki dan sebagainya. Dari pengamatan sementara, diketahui bahwa potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal dan masih dapat untuk diperdagangkan antar pulau.

Jenis-jenis yang penting dari kelompok jenis yang bukan ikan adalah udang, rumput laut, mutiara, kerang-kerangan, teripang dan sebagainya. Sesuai dengan hasil penangkapan maupun hasil-hasil survey yang pernah dilakukan, maka perairan yang mengandung jenis-jenis udang, adalah sekitar Kepulauan Aru, Kecamatan Jailolo, Kecamatan Oba, perairan teluk Kao yaitu di Kecamatan Tobelo, Kecamatan Kao dan Kecamatan Wasile. Hal ini tidak berarti bahwa lokasi-lokasi lain tidak memiliki komoditi ini.

Penangkapan yang dilakukan di perairan sekitar kepulauan Aru telah dijumpai adanya tendensi terlampauinya batas potensi lestari. Perairan pada lokasi lain tidak sesuai lagi untuk penangkapan di laut. Pada lokasi-lokasi ini hanya dapat direkomendir sebagai penghasil induk untuk menghasilkan bibit untuk usaha budidaya.

Propinsi Maluku memiliki beberapa jenis rumput laut yang ekonomis penting. Perairan yang selama ini dikenal sebagai penghasil rumput laut adalah sekitar kepulauan Aru, sekitar kepulauan terselatan (Dati II Maluku Tenggara), sekitar Kecamatan Seram Timur dan sekitarnya Kepulauan Sula. Cara-cara panen dan penanganan sesudah panen masih dilaksanakan secara tradisional. Panen hanya setahun sekali. Komoditi ini dapat dibudidayakan.

Adapun perairan di Maluku yang mengandung mutiara adalah sekitar kepulauan Aru, teluk Kao, sebelah Barat Pulau Taliabu dan sekitar kepulauan Bacan. Dua lokasi tersebut pertama sudah diusahakan sejak lama oleh penduduk setempat dan merupakan mata pencaharian

many as 1.421.900 doses, vaccine SE as many as 21.600 doses, and medicine as many as 37.320 doses.

Meat products during Pelita III increas from 1.512.818 kg into 1.754.269 kg or an increase average of 3,8% per year. the percentage of increase concerned is higher than the percentage of population growth rate in the province of Moluccas. (2,89%)

The meat consumption per capita per year during Pelita III in the Moluccas are about 1,10 kg to 1,15 kg, where the average increase per year is relative low, namely only as much as 0,9%. The meat consumption target per capita per year which is determined in Pelita III is higher than the relization achieved. The low consumption of meat per capita is due to the supply of slaughtering cattle are mostly imported from other places, also because of the consumption is more emphasized on fishes.

During Pelita III the eggs production is continually increasing from 15.519.700 eggs in the year 1979, boosted into 29.556.552 eggs in the year 1983 or the increase average of 17.5%. See Table III – 10.

Eggs consumption per capita during Pelita III increase the average of 14,13% per year, while the increase of eggs consumption per capita is not yet achieving the target stipulated in Pelita III. Nevertheless the average percentage of consumption increase achieved from year to year during Pelita III is of 14,13%. This number is higher than the average target namely as much as 9,6%.

d. Fishery

The province of Moluccas is in the prossession of great potentiality in fishery. This potentiality is estimated reaching 1,9 million ton per year (standing stock). By taking into consideration its genuity, the poptentiality can be utilized to the maximum limit (sustainable yield) as big as 50% or about 0,95% million ton per year. Compared with the number and percentage of production achieved up till now, there is still a great opportunity to be enhanced. According to Bleeker and Wallace, the waters of the Moluccas are yeielding about 780 types of fishes, are relative great number. Based on the activities done according to the definition of catching efforts and acculturation, the types of fishery sources can be distinguished as sources of catching and sources of acculturation.

The catching source at sea : the types of fishes caught in the sea waters are the pelagis fishes, demersal fishes, shell fishes, and bandeng fishes. The non-fishes type is included the types of shrimps, types of perals, sea-weeds, shells and oysters, sea-cucumbers, and the like.

The catching of pelagis fishes which have been done intensively up till now is of the types of cakalang fish, kembung, kayang, and julung-julung. The catching system is also limited in the waters of the island of Ambon and surroundings and the islands of Lease, the island of Ternate, and Tidore.

In the other regions of water the level of enterprise is not yeat developed, for example around the island of Seram, Halmahera, the islands of Aru, etc. Besides that, there are still to be found other types of fishes which are of great significance, that can be utilized in the future, namely the types of big tunas. The types of demersal fishes which form the basic inhabitants, up till now have been much exploited.

Except the types of shrimps (panacus spp). other types are still put into endeavours. This fact is due not because of the limited source potentiality, but because of its living characteristics, where the place of catching needs special technique.

Comensurating with the condition of the Moluccas waters which belong to the tropical waters with basic bottom of sea reefs, then the types of reef fishes including the ornament fishes are found and scattered with the most concentration in certain locations. Up till the present the utilization of this source is still too scarce. Nevertheless as far as we know, the source potentiality of the reef fishes is not inferior to fulfill the local consumption need and the inter-insular trade and commerce.

In these few last years the bandeng seeds have been found in several location in the waters of the Moluccas, among other in the surroundings of the island of Ternate, the northern coast of West Seram, the Makariki Bay, and others. From the contemporary survey, it is know that the existing potentiality can be utilized for the local needs and is still able to be traded inter-insular.

Important types from the non-fishes group are shrimps, se-weeds, pearls, shells and cysters, sea-cucumbers, and the like. According to the results of catching and survey results being done, then the waters yielding types of shrimps are found around the Aru islands group, sub-district of Jailolo, sub-district of Oba, the waters of Kao Bay, namely in the sub-district of Tobelo, the sub-district of Kao, and the sub-district of Wasile. This does not mean that other locations is not in the possession of this commodity.

pokok.

Sejak tahun 1969 pada kedua lokasi tersebut telah diadakan budidaya/kultivasi atau dapat juga disebut pemeliharaan mutiara melalui joint venture antara modal asing dan swasta nasional. Berbeda halnya dengan budidaya udang atau jenis ikan bandeng dimana nener atau bibit yang terpelihara ditambak atau dikolam, maka pada kultivasi mutiara, induknyalah yang dikultivasikan dengan maksud untuk memperoleh biji mutiara. Setelah biji mutiara diperoleh, maka induk tadi dibunuh, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk memperbanyak turunannya. Lokasi Taliabu Barat sementara diusahakan, tetapi bukan oleh nelayan-nelayan lokal melainkan nelayan-nelayan yang berasal dari kepulauan Banggai. Lokasi sekitar pulau-pulau Bacan, belum diusahakan.

Sesuai dengan topography dasar laut, maka jenis kerang-kerangan lain terdapat tersebar diseluruh perairan Maluku dengan konsentrasi di beberapa lokasi tertentu. Jenis-jenis yang selama ini diperdagangkan adalah lolak, abolone, batulaga dan kerang dara.

Jenis sumber yang dapat dibudidayakan di laut adalah, jenis-jenis rumput laut, kerang mutiara, kerang dara, beberapa jenis kerang lainnya, dan beberapa jenis ikan. Jenis-jenis yang dapat dibudidayakan diperairan Payau adalah jenis-jenis udang dan ikan bandeng. Walaupun hingga saat ini belum berkembang tetapi jenis ikan mas, ikan nila, mujair, dan sebagainya dapat dibudidayakan di perairan tawar di Propinsi Maluku.

Ketiga jenis budidaya tersebut diatas mempunyai prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan pada masa-masa yang akan datang di Propinsi Maluku oleh karena semua persyaratan yang diperlukan untuk maksud tersebut sudah terpenuhi, baik jenis-jenis yang akan dibudidayakan maupun areal untuk budidaya.

Produksi

Produksi perikanan Maluku pada tahun pertama Pelita III (1979) adalah sebesar 71.574 ton. Pada tahun-tahun berikutnya produksi meningkat dengan rata-rata 5,49% setiap tahun sehingga pada tahun terakhir Pelita III produksi menjadi 88,640 ton. Prosentase riil kenaikan produksi tersebut cukup menggembirakan walaupun masih rendah dari target kenaikan yang ditetapkan dalam Repelita IV yaitu sebesar 8,4% setiap tahun. Laju kenaikan produksi ini disebabkan makin bertambahnya armada penangkapan berupa kapal motor dan perahu penangkapan yang digerakkan oleh motor tempel. Dengan demikian daerah penangkapan menjadi lebih luas, terutama pada daerah-daerah yang subur. Pada tahun 1979 jumlah kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar 167 dan 612 buah.

Sejak tahun ke II sampai dengan tahun terakhir Pelita III (1983) jumlah alat-alat penangkapan selalu bertambah. Jenis kapal motor meningkat dengan rata-rata 11,3% setiap tahun, sedangkan jenis perahu bermotor tempel meningkat dengan 17,5%. Sampai dengan tahun terakhir Pelita III (1983), kapal motor berjumlah 320 buah, sedangkan perahu bermotor tempel ada sebanyak 940 buah. Lihat Tabel III-11.

Dari segi pemasaran maka sebagian dari produksi yang dihasilkan diekspor, dan sebagian lagi diperdagangkan interinsuler, sisanya untuk pasaran lokal.

Pemasaran

Jumlah komoditi perikanan yang diekspor selama Pelita III adalah 13 jenis, yang berarti bertambah 3 jenis dari Pelita III. Secara umum dapat dijelaskan bahwa perkembangan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan selama Pelita III terdapat kenaikan yang cukup menggembirakan, namun demikian dari tahun ke tahun dilihat dari beberapa komoditi masih terdapat berfluktuasi.

Bila pada tahun I Pelita III volume produksi yang di ekspor sebesar 6.022,8 ton, maka pada tahun berikutnya volume ekspor meningkat dengan rata-rata 32% dan pada tahun 1981 mencapai 10.478,6 ton. Dan pada tahun keempat (1982) volume ekspor menurun kurang lebih 30% yaitu menjadi 7.764,5 ton dan tahun terakhir Pelita III sebesar 5.593,1 ton. Adapun besarnya fluktuasi volume ekspor ini disebabkan oleh adanya resesi ekonomi dunia yang terutama mempengaruhi akan permintaan jenis ikan cakalang. Nilai ekspor yang pada tahun pertama Pelita III sebesar $ 31.423.729 naik menjadi $ 31.463.525 pada tahun 1980. Pada tahun-tahun berikutnya nilai ekspor terus menurun sehingga pada tahun terakhir Pelita III nilai ekspor komoditi perikanan Dati I Maluku sebesar $ 25.825.004,-. Lihat Tabel III-12.

Volume produksi perikanan yang berhasil dipasarkan interinsuler pada tahun pertama Pelita III sebesar 1.850 ton. Dengan kenaikan rata-rata tiap tahun sekitar 8%, maka pada tahun terakhir Pelita III (1983) volume produksi yang dipasarkan interinsuler ini mencapai 2.380 ton. Nilai yang diperoleh pada tahun pertama adalah sebesar $ 462.500,- meningkat rata-rata tiap tahun dengan 6% sehingga pada tahun terakhir Pelita III mencapai $ 575.960.

The catching done in the waters around the Aru island group have been found a tendency of exceeding the limit of preservation. The waters in other location are not adequate any more for the catching in the sea. In the location is only able to recommended as the main source to produce seeds to be cultivated.

The province of the Moluccas is in the possession of several types of sea-weeds which are economical of great importance. The waters which up till now know as the producer of sea-weeds are around the Aru islands group, around the most southern situated islands (the district of Southeast Moluccas), around the subdistrict of East Seram, and around the island of Sula. The way of harvesting and tackling after harvest is still done in the traditional manner. The harvest is only done once a year. This commodity can be cultivated.

The waters in the Moluccas yielding pearls are around the Aru islands, the Bay of Kao, the western side of Taliabu island, and around the island of Bacan. The two locations first mentioned have been exploited since long by the local population and has been the living means of them.

Since the year 1969 in the two location there have been done cultivation or can also be called cultivating of pearls by joint ventures between the foreign capital and the domestic private capital investor. Unlike the cultivation of shrimps or the bandeng fishes where the seedlings are cultivated in the pounds, in the cultivation of pearls the mother-shell are cultivated in order to produce pearls. After the pearl stones having been achieved then the mother shells should be killed, sothat no opportunity for them to multiply their descendents. The location of West Taliabu is in the making, but not by the local fishers, but by the fishers coming from the Banggai island group. The location around the island of Bacan is not yet exploited.

In lines with the topography on the sea bottoms, the other types of shells and oysters are found scattered throughout the whole waters of Moluccas with the concentration in some certain locations. The types that up till now have been traded are lolaks, abolone, batulaga, and kerang dara.

The types that can be cultivated in the sea are the types of seweed, pearl-shells, kerang dara, some other types of shells and oysters, and a number of fishes types. The types being able to cultivated in the morass waters are the shrimps and the bandeng fishes; Althought up till the present it is not yet developed, but the types of gold fishes, the nila fishes, mujair, and the like, can be cultivated in the fresh waters in the province of Moluccas.

The three types of cultivations mentioned above have a favourable prospect to be developed in the future in the province of Moluccas, because all prerequisites necessary for the intention concerned have been fulfilled, either the types that should be cultivated or the areals for the cultivation.

Production

The production of fishery in the Moluccas in the first year of Pelita III (1979) is as much as 71.574 ton . In the following years the production increase with the average of 5,49% per year, so that at the last year of Pelita III the production reches 88,640 ton. The real precentage of the production increase concerned is sufficient favourable, although it is still lower than the target stipulated in Repelita IV, namely as much as 8,4% per year. The increase growth speed is caused by the accrue of the catching fleet of motorboats and trawlers and outboard motor. Doing so the areal of catching become more extensive especially in the fertile areals. In the year 1979 the amount of motorboats and outboard motors are respectively as much as 167 and 612 units.

Since the second year till the last year of Pelita III (1983) the total amount of catching means area always increasing. The types of motorboats increase with the average of 11,3% per year, while the outboard motors increase with 17,5%. Up till the las year of Pelita III (1983), the motorboats is as many as 320 units, while the outboard motors are 940 units. See Table III – 11

From the aspect of marketing a part of the production is exported, and the other part is traded interinsuler, and the rest is destined for the local marketing.

Marketing

The amount of fish commodities exported during Pelita III are thirteen types; which means the acrcrue of three types of Pelita II. In general we can explain that the development of the olume development and the value of export of fish commodities during Pelita II having and increase of favourable prospect, but if viewed from year to year from some commodities there are still fluctuations.

If in the first yar of Pelita III the volume of production being exported as much as 6.022,8 ton then in the next year the volume of export increases with the average of 32% and in the year 1981 reaches 10.478,6 tons. And in the fourth year (1982) the export volume decreases about 30% namely into 7.764,5 tons and in the last year of Pelita III into 5.593,1 tons. The amount of fluctuation of the export volume is caused by the world economic

Jika dibandingkan antara jumlah volume produksi yang dipasarkan interinsuler serta nilainya selama Pelita II, maka dengan realisasi pada Pelita III terdapat kenaikan masing-masing untuk volume produksi, 41,4% dan nilai 66%. Volume produksi yang dicapai selama Pelita III tersebut lebih tinggi yaitu dari target yang ditetapkan dalam Repelita IV propinsi Dati I Maluku.

recession with is primarily influence the demand of the cakalang fishes. The export value in the first year of Pelita III is as much as $ 31.423.729 increase to $ 31.463.525 in the year 1980. In the following years the export value constantly declines so that in the last year of Pelita III the export value on fishery commodities of the province of Moluccas is as much as $ 25.825.004. See Table III – 12

Tabel / *Table III — 11*

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN DATI I MALUKU SELAMA PELITA III
DEVELOPMENT OF FISHERY PRODUCTION OF THE PROVINCE OF MOLUCCAS DURING PELITA III

No	Perincian / *Details*	Produksi Pada Tahun (Ton) / *Production in the year (in tons)* 1979	1980	1981	1982	1983	Rata-rata Kenaikan % / *The average increase*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Produksi Total :	71.574	74.541	83.630	84.018	88.62	5,49
	1.1. Perikanan Laut/ *Sea Fishery*	69.685	72.557	81.567	81.885	86.409	5,52
	- Penangkapan/ *Catching*	69.685	72.577	81.567	81.885	86.409	5,52
	- Budidaya/*Cultivation*	—	—	—	—	—	—
	1.2. Perikanan Darat/ *Fresh water fishery*	1.889	1.984	2.063	2.133	2.220	4,12
	- Penangkapan/*Catching*	1.685	1.934	2.013	2.083	2.160	3,75
	- Budidaya/*Cultivation*	24	25	25	25	30	5,74
	- Kolam Tenang/*Calm pounds*	24	25	25	25	30	5,74

Tabel / *Table III — 12*

PERKEMBANGAN VOLUME NILAI EKSPOR KOMODITI PERIKANAN SELAMA PELITA III
DEVELOPMENT OF VOLUMES OF EXPORT VALUE ON THE FISHERY COMMODITIES DURING PELITA III

Volume = Ton, Nilai / *Volume : Ton, Value US $*

No.	Komoditi *Commodity*	1979 Volume *Volume*	1979 Nilai *Value*	1980 Volume *Volume*	1980 Nilai *Value*	1981 Volume *Volume*	1981 Nilai *Value*	1982 Volume *Volume*	1982 Nilai *Value*	1983 Volume *Volume*	1983 Nilai *Value*	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		6.022,8	31.423.729	8.415,4	31.463.525	10.478,6	30.362.733	7.764,5	27.553.672	5.593,1	25.825.004	
1.	Udang/*Shrimps*	3.445,1	27.235,548	3.075,8	22.920.789	2.898,3	19.801.553	3.042,0	19.008.124	3.048,3	19.049.068	
2.	Ikan Cakalang/ *Cikalang fish*	2.264,9	1.669.025	5.014,5	4.711.516	7.463,2	6.807.923	3.926,8	4.079.515	2.133,6	2.216.876	
3.	Kulit Penyu/*Turtles skin*	—	—	4,7	6.330	—	—	—	—	—	—	
4.	Cumi-Cumi/*Inkt fish*	13,2	14.069	5,1	11.299	—	—	648,0	632	—	—	
5.	Lolak/*Lolaks*	226,4	257.429	249,8	287.179	80,0	83.400	109,5	135.700	134,4	166.514	
6.	Mutiara (Butiran)/ *Pearls (stones)*	0,1	2.054.881	0,1	3.294.390	0,1	3.466.480	0,5	4.093.028	0,4	3.973.499	
7.	Kulit Mutiara/*Pearl shells*	22,5	13.750	25,4	53.700	—	—	5,0	27.500	16,2	89.385	
8.	Teripang/ *Sea-cucumbers*	17,5	29.420	29,9	127.405	14,0	17.358	—	—	21	26.134	
9.	Sirip Ikan Hiu/ *Shark fins*	17,3	104.673	4,8	37.950	11,9	127.896	25,4	151.198	33	197.201	
10.	Jeping-Jeping/ *Caping-caping*	1,8	2.516	5,6	10.000	2,7	7.508	—	—	9,5	23.893	
11.	Batu Laga/*Batulaga*	4,0	22.488	1,7	2.807	6,4	50.615	5,0	50.250	7,4	74.679	
12.	Black Lips Shell	—	—	—	—	—	—	2,3	7.325	—	—	
13.	Rumput Laut/ *Sea weeds*	—	—	—	—	—	—	—	—	190,3	8.755	

Perkembangan volume dan nilai pemasaran ikan lokal di Dati I Maluku menunjukkan bahwa angka produksi berjumlah 353.484,4 ton dengan nilai sebesar $ 62.173.969. Sedangkan volume produksi ini ternyata lebih rendah dari target yang diproyeksikan dalam Repelita III Daerah yaitu sebesar 379.371 ton atau 7% lebih besar dari realisasinya. Produksi yang dipasarkan secara lokal inilah yang dikonsumer oleh penduduk Maluku. Lihat Tabel III-13.

Dari beberapa perhitungan dengan mempergunakan dasar pertimbangan bahwa makanan pokok penduduk Maluku adalah non beras serta kurang tersedianya faktor subsitusi yang mengandung cukup protein, maka untuk memenuhi syarat gizi perkapita penduduk Maluku harus mengkonsumir ikan sebanyak 50 Kg setiap tahun.

Perkembangan konsumsi ikan di Maluku pada Pelita II (1978) perkapita penduduk Maluku, sebesar 41,6 Kg, meningkat menjadi 43,4 Kg pada

Production volume of fishery that are succeded being traded inter-insular in the firsth year of Pelita III as big as 1.850 tons with the aerage increase of annually 8%, therefore at the last year of Pelita III (1983) the production volume being traded interinsular reaches 2.380 tons. The value achieved in the first year is as much as $ 462.500 increase with the average of annually about 6% so that at the last year of Pelita III reaches $ 575.90.

If we compare the amount of production volume which is traded interinsular with its value during Pelita II with the realization III we can see an increase respectivelly fot the production volume, 41,4% and the volume of 66%. The prduction value reached during Pelita III concerned is higher than the target estimated in Pelita IV of the province of Moluccas.

The development of volume and value of marketing of the local fishes in the province of Moluccas show that the number of production is 353.484,4



Keindahan laut Maluku mempunyai daya tarik khusus. Sebagai obyek wisata, potensinya besar. Apalagi dengan upacara adatnya, yang semakin menjadi atraksi laut istimewa. Kesempatan itu pun tak dilewatkan oleh Presiden Soeharto untuk menyaksikannya.

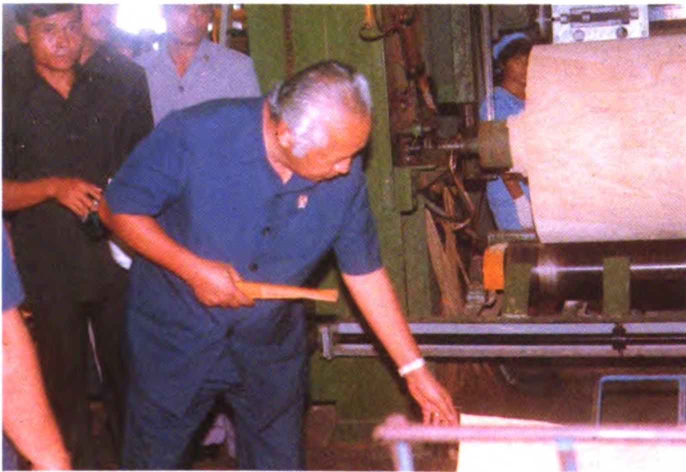
The beauty of the sea in Molucca Province is of special interest. As a tourist object, it is very potential especially when combined with its traditional ceremony. Such a unique attraction has once drawn the attention of no-less-than the chief Executive President Soeharto.















Rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Maluku, ketika meresmikan beroperasinya Pabrik Plywood, PT. Jati Group. Nampak Presiden Soeharto ketika membubuhkan tandatangan didampingi oleh Menteri Kehutanan, Soedjarwo serta Gubernur Maluku, Hassan Slamet. Hasil industrinya juga nampak pada gambar lain.

A series of the President's official visits to Molucca on the occasion of inaugurating the operation of the Jati Group Plywood Factory. President Soeharto put down his signature witnessed by the Minister of Forestry, Mr. Soedjarwo, and the Governor of Molucca Province, Mr. Hasan Slamet. The other pictures illustrate the products of this industry.



Jika Maluku dikenal sebagai penghasil ikan, tentunya karena kekayaan lautnya. Tak heran andai antusias Gubernur Maluku, Hassan Slamet, cukup menggebu untuk memanen. Bahkan nampak pula Gubernur NTB Gatot Soeherman turut mencoba memanennya ketika berkunjung ke Maluku.

Molucca is popularly knows as fish producer since its sea is abundant with this valuable property. The Governor of Molucca Province, Mr. Hasan Slamet, was enthusiastic to harvest fish, while the Governor of West Nusa Tenggara, Mr. Gatot Soeherman, happily joined when he visited Molucca.

















Seni budaya dan keindahan alam seringkali mampu menawarkan sesuatu yang menarik untuk pengembangan sektor pariwisata. Demikian juga di Maluku. Beragam seni seperti nampak dalam gambar, tumbuh dan berkembang. Mengenai keindahan alamnya, foto ini mampu berbicara banyak.

Cultural art and natural beauty are often capable of creating attraction for the promotion of tourism. Molucca has the fortune to have both. The picture of the natural beauty in this area tells a lot by itself.











Kantor Gubernur KDH Tkt I Maluku, gedung Walikotamadya II Ambon, tugu pahlawan Pattimura dan aneka corak bangunan lainnya yang ada di Ambon, semakin menambah semaraknya kota "sagu" ini.

The Office of the Governor, Head of the Regional Administration of Molucca Province; Office Building of the Mayor of Ambon Municipality II; the Hero Monument of Pattimura; and different kinds of building styles in Ambon enriching the attractiveness of Ambon, the "sago" town









Fasilitas sarana pendidikan dan kebudayaan di Maluku kian memadai. Dalam gambar antara lain nampak gedung kesenian, asrama untuk SLB, gedung perpustakaan, balai Penataran Guru dan fasilitas lainnya. Keadaannya pun cukup memberikan angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan.

Education and cultural facilities are getting better in Molucca Province. Appearing on the pictures are an art building, a dormitory for extraordinary school, a library building, a workshop for upgrading teachers and others; while the climate is encouraging for the development of this sector.











Gubernur Maluku Hassan Slamet atas nama Presiden menyerahkan bantuan sapi Bali kepada Transmigran di pulau Buru, khususnya transmigran teladan. Kecuali lahan pertanian, foto lain juga menggambarkan hasil perkebunan kelapa hibrida. Pemetikan perdana dilakukan oleh Gubernur.

Governor Hassan Slamet on behalf of the President presented Bali cows, aid from the President, to transmigrants in Buru Island. In addition to agricultural land, the photoes also illustrate the products of hybrid coconut plantation. The first harvest of this estate was conducted by the Governor.









Rangkuman foto di halaman ini jelas menunjukkan bahwa denyut pembangunan di sektor pendidikan dan kebudayaan terasa sekali manfaatnya. Minat baca semakin berkembang, apalagi kegiatan kepramukaan dan jenis ketrampilan lain serta seni budaya terus mendapat perhatian.

Photo coverage on this page represents the development activities in education and cultural sector which has been touching the need of the people. Reading habit is increasing, while scouts activities and the promotion of other practical capabilities remain draw serious attention.











Tabel / *Table III — 13*

PERKEMBANGAN VOLUME DAN NILAI PEMASARAN INTERINSULER DAN PEMASARAN LOKAL KOMODITI PERIKANAN SELAMA PELITA III
DEVELOPMENT OF VALUE AND VOLUME OF MARKETING OF INTERINSULAR AND LOCAL MARKETING ON FISHERY COMMODITION DURING PELITA III

No	Tahun *Year*	Pemasaran Interinsular *Interinsular Marketing* Volume (Ton) *Volume (in tons)*	Pemasaran Interinsular *Interinsular Marketing* Nilai US $ *Value (US $)*	Pemasaran lokal *Local Marketing* Volume (Ton) *Volume (in tons)*	Pemasaran lokal *Local Marketing* Nilai US $ *Value (US $)*	Keterangan *Note*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	1979	1.850	462.500,4	63.701,4	11.848,460	
2.	1980	1.950	468.000	64.065,3	11.403.623	
3.	1982	2.245	543.290	74.009,0	13.099.593	
4.	1983	2.380	575.960	80.666,4	14.277.952	
Jumlah/*Total*		10.535	2.536.500	353.484,4	62.173.969	

tahun pertama Pelita III (1979). Dan selama Pelita III angka konsumsi tersebut meningkat rata-rata dengan 2,4% tiap tahun sehingga pada tahun **terakhir Pelita III mencapai angka 47,8 Kg. Sedangkan target yang diproyeksikan untuk konsumsi lokal tersebut adalah sebesar 379,371** ton, ternyata lebih tinggi sebesar 13,7% dari realisasi. Lihat Tabel III-14.

e. Perkebunan

Dalam upaya menjaga dan mempertahankan struktur dasar yang ada dalam hal pemilikan dan pengelolaan usaha perkebunan, usaha-usaha yang mengarah kepada penggunaan dan penguasaan tanah secara besar-besaran untuk mengembangkan tanaman perkebunan, diarahkan untuk menggunakan pola yang menjamin aspek pemerataan.

Pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan produksi, mutu dan pemasaran melalui peremajaan, penggunaan bibit unggul dan pemberantasan hama, perluasan, areal, penyediaan prasarana dan sarana serta penyuluhan. Sedangkan pembangunan baru perkebunan besar terutama dengan mempergunakan pola NES/PIR.

Tanaman perkebunan hingga saat ini masih memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian Daerah Tingkat I Maluku dan merupakan sumber utama pendapatan sebagian terbesar rakyat Maluku. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa pemilihan dan pengusahaan tanaman perkebunan di daerah ini sebagian besar berada di tangan rakyat.

Jenis tanaman perkebunan di Maluku adalah kelapa, cengkeh, pala, kopi, coklat, jambu mete dan lain-lain. Selama Pelita III luas areal tanaman meningkat rata-rata 2,5% setahun yakni dari 164.699 Ha pada awal Pelita III naik menjadi 182.273 Ha pada akhir Pelita III.

Luas areal tanaman perkebunan tersebut terdiri dari kelapa 134.832 Ha, cengkeh 23.635 Ha, pala 13.643 Ha, coklat 5.945 Ha, kopi 2.806 Ha dan lain-lain 1.412 Ha, dengan produksi potensial yang dapat dicapai masing-masing 165.000 ton untuk kelapa, 8.000 ton untuk cengkeh, 3.500 ton untuk coklat, 500 ton untuk kopi, dan jenis-jenis lain sebanyak 250 ton.

Sebagian dari jenis tanaman perkebunan tersebut memberikan hasil secara musiman dan berada pada tingkat produksi yang berfluktuasi disebabkan oleh serangan hama, umur tanaman yang sudah tua dan sebagainya. Lihat Tabel III-15.

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Tingkat I Maluku, maka produksi riil pada akhir Pelita III (1983) untuk 6 jenis tanaman perkebunan adalah: kelapa sebanyak 132.130 ton dan meningkat pada tahun 1985 menjadi 187.632,5 ton, kemudian cengkeh pada tahun 1983 sebanyak 4.970 ton, meningkat pada tahun 1985 menjadi 6.918,3 ton. Berikutnya pala akhir Pelita III sebanyak 3.635 ton, meningkat pada tahun 1985 menjadi 2.765,8 ton, kemudian coklat pada tahun 1983 sebanyak 2.547 ton, meningkat pada tahun 1985 menjadi 2.975,8 ton. Sedangkan kopi pada tahun 1983 produksinya ada sebanyak 375 ton, menurun pada tahun 1985 menjadi 334,2 ton dan lain-lain termasuk jambu mente, cassiavera dan kapuk yang pada tahun 1983 berjumlah 108 ton, meningkat pada tahun 1985 menjadi 182,5 ton. Lihat Tabel III-16.

f. Kehutanan

Sumber daya alam hutan di Propinsi Dati I Maluku meliputi areal sekitar 6 juta Ha. Untuk keperluan perencanaan pengelolaan hutan secara berdayaguna dan berhasilguna, baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka dalam Pelita III telah disusun Pola Tata Guna

ton with the value of 62.173.969. Meanwhile this production value turns out to be lower than the target projected in Repelita III of the region namely as much as 379.371 tons or 7% bigger than the its realization. The production that has been traded locally that is consumed by the population in the Moluccas. See Table III – 13

From some calculation by using basic considerations that the primary food of the population of the province of Moluccas is non-rice and the lack of substitution factors which is yielding enough protein, then to fulfill to nutritional requirements per capita of the population in the Moluccas they should consume fishes as many as 50 kg per year.

The development of fish consumption in the Moluccas in Pelita II (1978) the population in the Moluccas as much as 41,6 kg increase into 43,4 kg in the first year of Pelita III (1979). And during Pelita III the number of the consumption concerned increase with the average of 2,4% per year, so that in the las year of Pelita III reaches the number of 47,8 kg. Meanwhile the target projected for the local consumption concerned is as much as 379,371 ton, turns out to be higher 13,7% of the realizatin. See Table III – 14

Tabel / *Table III — 14*

PERKEMBANGAN KONSUMSI IKAN PER KAPITA SELAMA PELITA III DI MALUKU
DEVELOPMENT OF FISH CONSUMPTION PER CAPITA DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS

Tahun *Year*	Produksi yang dikonsumsi (Kg) *Production being consumed (in kg)*	Jumlah Penduduk *Amount of population*	Konsumsi Per Kapita Per tahun *Consumption per capita per year*	Keterangan *Note*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1979	59.366.426	1.367.890	43,4 Kg	
1980	62.535.268	1.408.452	44,4 Kg	
1981	64.831.276	1.431.154	45,3 Kg	
1982	68.919.546	1.463.260	47,1 Kg	
1983	71.909.029	1.504.373	47,8 Kg	

e. Plantation

In the efforts to secure and maintain the basic structure in existence in the matter of owning and management of plantation enterprise, the efforts oriented towards the induse and landsmastering in great amounts to develop plantation crops, are directed to the usage of securing the aspect of equitable distribution.

The development of plantation is destined to increase production, the standar quality and marketing, through regeneration of crops, the using of high quality seeds, and the combating plants pest, and information and guidance. Meanwhile the new development of big plantation especially by using the pastern of NES/PIR or the small holders estate. The plantation crops up till now is playing a great role in the economic activities of the province of Moluccas and is the main source of income of the most parts of the population in the Moluccas. This fact is caused by the reality that the ownership and cultivation of plantation crops in this area is mostly in the hand of te population. The types of plantation crops in the Moluccas are coconut, cloves, nutmegs, coffee, cocoa, cashew nut, etc. During Pelita III the areal of of the crops is increasing on the average of about 2,5% per year, namely from 164.699 ha in the beginning of Pelita III into 182.273 ha at the end of Pelita III.

The areal of the plantation crops concerned is consisting of coconut 134.832 ha, cloves 23.635 ha, nutmegs 13.643 ha, cocoa 5.945 ha, coffe 2.806 ha, and othes 1.412 ha, with potential production that can be achieved each 165.000 tons for coconut, 8.000 tons for cloves, 35000 tons for cocoa, 500 tons for coffee, and for the other types as many as 250 tons.

A part from the types of the plantation crops concorned give seasonable products and is on the level of production with the fluctuation due to plants pest, over-aged plants, etc.
See Table III – 15

Based on the data from the Plantation Service of the province of Moluccas then the real production at the end of Pelita III (1983) for six type of plantation crops are : coconut as much as 132.130 ton and increased in the year 1985 as much as 4.970 ton, increase in the year 1985 in to 6.918,3 ton. The next is nutmeg which is at the end of Pelita III is much as 3.635 ton, increase in the year 1985 into 2.765,8 ton, the cocoa in the year 1983 as much as 2.547 ton, increase in the year 1985 in to 1.975 ton. Meanwhile coffee in the year 1983 the production is 375 ton declines in the year 1985 into 334,2 ton production is 375 ton declines in the year 1985 into 334,2 ton, and ohters including cashew nut and cassiavera and kapuk which are in the year 1983 totally area 108 ton increase in the year 1985 into 182,5 ton. See Table III – 16

Tabel / *Table III — 15*

LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN PADA AKHIR PELITA III DIPERINCI MENURUT DATI II
THE AREAL OF PLANTATION AT THE END OF PELITA III IN DETAILS ACCORDING TO THE DISTRICTS

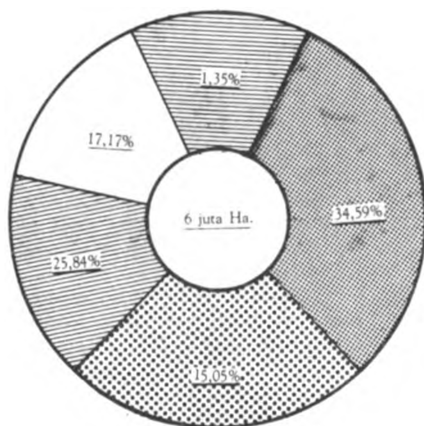
No	Dati II *Districts*	Jenis Tanaman Perkebunan *Types of plantation crops*				
		Kopi *Coffee*	Coklat *Cocoa*	Pala *Nutmeg*	Cengkeh *Cloves*	Kelapa *Coconut*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Maluku Utara/ *North Moluccas*	44,71	20,70	29,70	81,90	34,16
2.	Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	15,31	64,93	58,60	3,50	36,44
3.	Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	27,51	5,87	5,30	0,60	20,00
4.	Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	12,47	8,50	6,40	14,00	9,40
	Jumlah / *Total*	100	100	100	100	100

Hutan Kesepakatan untuk Daerah Maluku meliputi jangka waktu sampai dengan tahun 2.000.

Berdasarkan Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan, dari luas kawasan hutan tersebut 34,59% atau sekitar 2,08 juta Ha merupakan hutan produksi terbatas, dan sebanyak 17,17% atau sekitar 1,03 juta Ha merupakan hutan produksi bebas, 25,84% atau sekitar 1,55 juta Ha adalah hutan lindung, 15,05% atau sekitar 440,9 ribu Ha merupakan hutan suaka alam wisata, dan sisanya adalah hutan konservasi. Dengan demikian tahun 2.000 luas hutan akan menjadi sekitar 5,1 juta Ha atau 59,51% dari luas daratan. Lihat Grafik III-1.

Grafik / *Graphic III — 1*

TATAGUNA HUTAN KESEPAKATAN DI MALUKU
THE AGREED FORESTRY USE DESIGN IN THE MOLUCCAS



Hutan Produksi Terbatas 2.075.642.44 Ha (34,59%)
The Limited Production Forest

Hutan Produksi Bebas 1.029.929.0 Ha (17,17%)
The Free Production Forest

Hutan Lindung / *The Protected Forest* 1.550.356.0 Ha (25,84%)

Hutan Konversi / *The Conversion Forest* 903.116.8 Ha (1,35%)

Hutan Suaka Alam/Wisata / *The Wild Life Preservation/Tourism* 440.955.76 Ha (15,05%)

Produksi hasil hutan di Propinsi Maluku terutama diperoleh dari berbagai jenis kayu, seperti Meranti, Aghatis, Linggua, Marsawa dan lain-lain. Dari semua jenis tersebut didominir kayu Meranti dengan luas areal sekitar 800 ribu Ha. Potensi kayu jenis komersil mencapai sekitar 98,5 juta M^3 atau rata-rata 50 M^3/Ha, sedangkan untuk semua jenis mencapai sekitar 150 juta M^3 atau rata-rata 80 M^3/Ha. Kapasitas produksi berdasarkan potensi lestari adalah 2 juta M^3/tahun.

Tabel / *Table III — 16*

LUAS AREAL, JUMLAH PETANI, DAN TANAMAN PRODUKSI KELAPA, CENGKEH, PALA, COKLAT, KOPI, CASSIAVERA, JAMBU METE DAN KAPUK PROPINSI DATI MALUKU 1981 - 1985
AREALS, TOTAL FARMERS, AND PRODUCTION OF CROPS OF COCONUT, CLOVES, NUTMEGS, COCOA, COFFEE, CASSIAVERA, CASHEW NUTS, AND KAPUK. THE PROVINCE OF MOLUCCAS 1981 — 1985

Jenis *Types*	Tahun *Year*	Luas Areal (Ha) *Areal (Ha)*	Jumlah Petani *Amount of Farmers*	Jumlah Produksi (Kg) *Amount of Production (in kg)*
Kelapa/*Coconut*	1981	115.113	–	131.486.000
	1982	118.475	–	132.235.000
	1983	134.832	133.832	132.130.000
	1984	144.805	157.248	144.814.480
	1985	154.724	158.674	157.632.579
Cengkeh/*Cloves*	1981	22.818	–	4.417.000
	1982	23.552	–	4.953.000
	1983	23.685	43.095	4.970.000
	1984	24.620	47.352	5.277.910
	1985	28.330	45.232	6.918.384
Pala/*Nutmegs*	1981	13.283	–	2.272.400
	1982	13.541	–	2.351.200
	1983	13.643	5.511	2.635.000
	1984	13.380	11.481	2.673.830
	1985	15.420	11,981	2.765.809
Coklat/*Cocoa*	1981	4.449	–	1.540.600
	1982	4.429	–	1.528.000
	1983	5.945	9.056	2.405.000
	1984	6.600	11.385	2.342.530
	1985	7.590	12.285	2.975.850
Kopi/*Coffee*	1981	–	–	–
	1982	–	–	–
	1983	2.806	5.160	375.000
	1984	2.806	6.430	281.250
	1985	3.038	6.960	334.246
Cassiavera/	1981	–	–	–
	1982	–	–	–
	1983	260	·	5.000
	1984	288	466	5.000
	1985	354	357	5.278
Jambu Mete	1981	–	–	–
	1982	–	–	–
	1983	–	–	–
	1984	2.337	2.821	60.701
	1985	2.562	3.133	64.770
Kapuk/*Kapuk*		–	–	–
	–	–	–	–
	1983	802	109	103.000
	1984	857	862	103.000
	1985	1.030	1.050	112.455

f. Forestry

The natural resources of forestry in the province of Moluccas in covering the areal of about 6 million ha. For the purpose of planning of exploitation of the forest efficiently and effectively, either for the long run or for the short run, therefore in Pelita III it has been composed the design of forestry use for the province of Moluccas covering the period until the year 2000.

Based on the foretry use design, from the forestry areal concerned, 34,59 % or about 2,08 million ha is in the form of limited production forest, and as many as 17,17% or about 1,03 million ha is in the form of protected forest, and 15,05% or about 440,900 ha is in the form of wild life forestry preservation for tourism, and the rest in the form of conversion forest. Thus in the year 2000 the areal of forest will become 5,1 million ha or 59,51% of the whole land area. See graphic III – 1

GRAFIK/GRAPHIC III – 1

The production of forestry in the Moluccas in particular available from various kinds of wood, as the meranti, aghatis, lingue, marsawa, and the like. From all of these kinds of wood the meranti is dominant with covering the areal of about 800.000 ha. The wood potentiality for commercial purpose reaches the amount of about 98,5 million m3 or the average of 50 m3, while for all sorts of wood reaches about 150 million m3 or the average of 80 m3 per ha. The production capacity based on the genuine potentiality is 2 million m3 / per year.

Jenis hasil hutan lainnya adalah damar/kopal, rotan, kayu putih, lawang serta berbagai jenis fauna, seperti cendrawasih, nuri, kakatua, rusa, babi, kerbau, kasuari, dan sebagainya. Lihat Tabel III-17.

Other sorts of forest products are : resin, rattan, kayu putih, lawang, and various kinds of fauna, such as bird of paridise, parrots, cackatose, dear, pigs, buffalow, casuaries and the like. See Table III – 17

Tabel / *Table III — 17*

PRODUKSI BEBERAPA JENIS HASIL HUTAN SELAMA PELITA III
PRODUCTION OF SOME FOREST PRODUCTS DURING PELITA III

No	Jenis Hasil Hutan *Types of Forest Product*	Satuan *Unit*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984	Ket *Note*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kayu Log/*Log wood*	M^3	1.338,43	1.495,23	752,80	781,96	774,50	× 1000
2.	Kayu gergajian/ *Sawn wood*	M^3	11.145	24.264	17.829	35.651	14.464	
3.	Kayu pertukangan/ *Carpentry wood*	M^3	21.588	157.759	25.840	36.980	41.250	
4.	Kayu kuning/ *Yellow wood*		16.428	23.393	92.806	39.025	22.650	
5.	Kayu buah/*Fruit wood*	Bh	7.400	8.925	10.480	5.750	–	
6.	Kopal/*Kopal*	ton	440	610	354	322	311	
7.	Rotan/*Rattan*	ton	–	375.800	351.500	333.400	253.300	
8.	Cengkih Hutan/ *Wild Cloves*	kg	–	–		–	–	
9.	Satwa Liar/*Wild life*	ekor	9.161	2.964	–	–	–	
10.	Minyak Kayu Putih/ *Cajaput oil*	ton	115,55	104,16	115,77	122,04	136,30	

Selama Pelita III, produksi kayu log setiap tahun baru mencapai 54,43% dari kapasitas produksi berdasarkan potensi lestari. Penurunan produksi kayu log pada tahun 1981/1982 disebabkan oleh mulai ditingkatkannya kebijaksanaan pengelolaan hasil hutan dalam negeri sebagai realisasi SKB Tiga Menteri, disamping pengaruh resesi ekonomi dunia.

Mengenai jumlah perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan kayu meningkat dari 15 perusahaan pada tahun pertama Pelita III menjadi 29 perusahaan pada tahun terakhir Pelita III, disamping itu 10 perusahaan yang masih dalam tingkat survey agreement. Dalam kurun waktu yang sama areal hutan yang di HPH-kan meningkat dari 1,29 juta Ha menjadi 2,96 juta Ha, dan akan mencakup seluruh kawasan hutan produksi apabila 10 perusahaan tingkat SA sudah melaksanakan kegiatan eksploitasi.

Kemudian sebagai realisasi dari SKB Tiga Menteri tersebut pada tahun terakhir Pelita III, maka 4 unit industri kayu terpadu dari 12 unit yang diresmikan telah mulai berproduksi. Investasi di bidang industri perkayuan sampai dengan akhir Pelita III mencapai Rp 80 milyar dan telah menyerap sebanyak 3.000 tenaga kerja. Industri pengolahan hasil hutan lainnya meliputi minyak kayu putih, minyak lawang, dan industri kerajinan rotan.

Dari pengusahaan dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan selama Pelita III diperoleh devisa sebesar US $ 402, 46 juta dimana 95,18% berasal dari kayu dan kopal (bahan mentah) dan 4,82% berasal **dari pengolahan hasil hutan (industri). Dan dalam kurun waktu yang sama pendapatan daerah dari dana IHH dan IHHT masing-masing men**capai Rp 19,93 milyar dan Rp 1,02 milyar. Lihat Tabel III-18 dan III-19.

Sejalan dengan meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan hasil hutan, kelestarian sumber daya alam hutan pun terus ditingkatkan **pembinaannya. Melalui dana pemerintah telah dilaksanakan pembi-**

During Pelita III the production of Log wood annually reaches 54,43% of the production capacity based on the genuine potentiality. The decline of log wood production in the year 1981/1982 is caused by the acceleration of policy on the exploitation of forest products in the homeland as the realization of the joint letter of decision of three Ministers, besides the influence of the world economic recession.

Concerning the amount of enterprises involved in the wood exploitation increases from 15 companies in the first year of Pelita II into 29 companies in the last year of Pelita III, besides that there are 10 companies which are still on the survey agreement. In the same period of time the forest areal that have been given the right of forest exploitation increases from 1,29 million ha, and will be covering all the area of the whole production forest if the ten companies on the level of survey agreement have been doing their exploitation activities.

Later as the realization of the joint decision letter of the three Ministers at the end of Pelita III, the four integrated units of wood of the 12 units being officiated is beginning bringing forth production. The imvestment in the field of wood industry up till the end of Pelita III reaches Rp80 billion and have absorbed as many as 3000 labour force. The other industry exploiting forest products covering cajput oil, lawang oil, and rattan handicraft industry.

From the exploitation and utilization of the potentiality of the forest resources during Pelita III a number of foreign exchange has been acquired as much as US $ 402,46 million of which 95,18% is from the wood and kopal (raw materials) and 4,82 % is from the exploitation of forest products (industry). and in the same period of time the regional income from the IHH and IHHT funds each reaches Rp19,93 billion and Rp1,02 billion. See Tables III - 18 and III - 19.

Commensurating with the increase of exploiters and utilization of forest products the genuinity of the natural resources is constantly accelerated in

Tabel / *Table III — 18*

NILAI EXPORT HASIL HUTAN SELAMA PELITA III
THE EXPORT VALUE ON FORESTRY PRODUCTS DURING PELITA III

(Ribuan US $) / *(In US $ thousand)*

No Komoditi *Commodities*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984	Jumlah *Total*
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kayu Log/. *Log wood*	124.766,48	138.542,79	36.258,34	40.464,02	42.612,31	382.643,94
2. Damar/*Resin*	105,26	155,23	46,76	55,40	60,62	423,27
3. P a p a n/ *Wood shelves*	1.070,65	4.279,26	2.791,01	4.551,78	4.465,75	17.158,45
4. M. Kayu Putih/ *Cajput oil*	–	–	–	–	10,31	10,31
5. Ply Wood	–	–	–	–	2.140,80	2.140,80
Jumlah/*Total*	125.942,39	142.977,28	39.096,11	45.071,2	49.289,79	402.376,77

naan hutan seluas 1,8 ribu Ha, penghijauan seluas 70 Ha, penghijauan dengan jambu mente sebanyak 290 ribu biji disamping pembinaan dan pemberantasan hama kayu putih seluas 1.004 Ha.

Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada kawasan hutan HPH dibebankan pada Dana Jaminan Reboisasi berdasarkan ketentuan INPRES No 35 tahun 1980. Dana yang telah terkumpul sampai dengan tahun terakhir Pelita III sebanyak Rp 3,58 milyar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam Repelita IV. Luas areal yang telah direboisasi sekitar 350 Ha.

Sementara itu, luas lahan kritis dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun terakhir Pelita III, luas lahan kritis sekitar 296 ribu Ha, meningkat menjadi sekitar 360 ribu Ha pada tahun terakhir Pelita III, suatu peningkatan sebesar 14,86% atau rata-rata meningkat 3% setahun. Dari luas lahan kritis tersebut 61,77% terdapat di Kabupaten Maluku Tengah dan Kotamadya Ambon, 34,3% di Kabupaten Maluku Tenggara, 2,55% di Daerah Administratif Halmahera Tengah dan 1,38% di Kabupaten Maluku Utara.

Walaupun laju pertumbuhan pembangunan kehutanan selama Pelita III menunjukkan trend menurun, namun dalam Repelita IV, pembangunan kehutanan dapat memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini terletak pada potensi yang tersedia dan perkembangan dunia usaha di bidang pengelolaan hasil hutan.

Berdasarkan kemungkinan pengembangannya, maka dalam Repelita IV bidang kehutanan dihadapkan pada masalah pengembangan produksi terutama untuk menjamin kontinuitas pemenuhan bahan baku industri dan kebutuhan lainnya.

2. Industri

Pembangunan sektor industri di daerah Maluku selama kurun waktu Pelita III sebagai kelanjutan dari Pelita-Pelita sebelumnya telah memberikan dampak positif bagi perkembangan daerah walaupun peranannya belum berarti dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya baik jumlah jenis industri, jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja , jumlah investasi maupun produksi dan nilai tambah.

Selama kurun waktu Pelita III jumlah jenis industri telah meningkat dari 63 pada awal Pelita III menjadi 87 jenis pada akhir Pelita III. Dibandingkan dengan permulaan Pelita III maka jenis industri mengalami kenaikan sebesar 38,10% atau rata-rata peningkatan sebesar 8,4% setiap tahun. Dari jumlah jenis industri tersebut, tidak termasuk 20 jenis industri kerajinan rakyat yang meliputi 3.700 unit usaha dengan skala investasi sebesar Rp 500.000,- kebawah yang menyerap tenaga kerja sebesar 18.600 orang tersebar di daerah pedesaan. Disamping itu terdapat pula perkembangan dalam jumlah unit usaha dimana pada akhir Pelita III menjadi 1.150 unit. Dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 78,85% atau rata-rata tiap tahun 15,64%. Jumlah ini belum termasuk unit usaha industri kerajinan di pedesaan.

Dilihat dari segi penyerapan tenaga kerja di sektor industri, tahun pertama Pelita III terserap tenaga kerja sebesar 3.122 orang dan meningkat menjadi 26.959 orang akhir Pelita III sehingga mengalamai kenaikan sebesar 23.837 orang (763,52%) atau rata-rata mengalami kenaikan sebesar 71,42% tiap tahun.

Hal ini disebabkan pada pertengahan Pelita III terjadi pertambahan investasi melalui pembangunan 12 industri Plywood dan sebuah industri fishmill serta 8 buah industri sawmill yang menyerap banyak tenaga kerja dalam usaha PMDN.

Jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut tidak termasuk penyerapan tenaga kerja oleh jenis industri kerajinan rakyat.

Investasi sektor industri pada tahun pertama Pelita III adalah sebesar Rp 7.146.499.350 meningkat menjadi Rp 211.434.133.855 pada akhir Pelita III, berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 204.287.634.355,- (2.858,57%) atau rata-rata 133,22% setiap tahun. Kenaikan tadi disebabkan oleh pembangunan ± 23 industri berskala menengah sejak pertengahan Pelita III disamping pembangunan baru industri skala menengah yang termasuk BRO. Lihat Tabel III-20, III-21, III-22, dan III-23.

Sektor industri terdapat kenaikan baik untuk nilai produksi maupun nilai tambah masing-masing sebesar 54,50% dan 50,39% selama Pelita III atau masing-masing mengalami kenaikan sebesar 11,49% dan 10,74% setiap tahun.

Kenaikan-kenaikan pada nilai produksi serta nilai tambah disebabkan oleh beberapa faktor sbb :

(a). Bahwa jumlah perusahaan dari 643 unit usaha di tahun pertama Pelita III, telah naik menjadi 1.150 unit usaha pada akhir Pelita III atau mengalami kenaikan sebesar 78,35%. Jumlah tersebut merupakan unit usaha yang aktif berproduksi dan tidak termasuk jenis-jenis industri kerajinan yang tersebar di daerah pedesaan.

Tabel / *Table III — 19*

PENERIMAAN IHH DAN IHHT SELAMA PELITA III
THE INCOME OF IHH AND IHHT DURING PELITA III

(dalam ribuan Rp) / *(in Rp thousand)*

No	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	I.H.H. *IHH*	I.H.H.T. *IHHT*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1979/1980	4.104.601,75	373.751,04	4.478.352,79
2.	1980/1981	6.531.174,33	355.244,99	6.886.419,32
3.	1981/1982	2.906.407,44	100.459,80	3.006.867,24
4.	1982/1983	3.048.918,52	101.067,27	3.149.985,79
5.	1983/1984	3.334.849,53	84.865,03	3.419.814,56
	Jumlah / *Total*	19.925.951,57	1.015.488,13	20.941.439,70

its fostering efforts. By the governmental funds the fostering of the forest has been carried out as large as 1.800 ha, regreening as large as 70 ha, regreening by the cashew nut as large as 290.000 seedlings besides the fostering and combating the plants pest on kayuputih plants as large as 1.004 ha.

Reboisation and rehabilitation of fields in the areal of HPH forests is implemented on the security funds of reboisation based on the Inpres decision number 35 of the year 1980. The funds that have been collected till the last year of Pelita III is as much as Rp3,58 billion. The funds concerned will be used for the realization of activities in Repelita IV. The areal having been refotered is about 350 ha.

Meanwhile the areal of critical field from year to year is boosting. At the last year of Pelita II, the areal of critical land field is about 296.000 ha, increases into about 360.000 ha in the last year of Pelita III, an increase as big as 14,86% or the average increase of 3% per year. Of the areal of the critical field 61,77% is found in the district of Central Moluccas and the municipality of Ambon, 34,3 % is found in the district of Southeast Moluccas, 2,55 % in the administrative region of Central Halmahera, and 1,38 % in the district of North Moluccas.

Although the speed growth on the forestry development during Pelita shows a decline tendency, but in Pelita IV the development of forestry is able to give positive impact in achieving the development objectives in the region. This fact is in the potentiality in existence and the development of enterprise world in the field of forestry products exploitation.

Based on the possibilities of exploitation, in Pelita IV the field of forestry is faced with the problems on the acceleration of production especially to secure the continuation of the industrial law materials supply and other necessities.

2. Industry

The development in the industrial sector in the province of Moluccas during the period of Pelita III as the continuation of the previous Pelitas have given positive impact for the regional economic development although the role is not of so great significance in comparison with other sectors. This cact is marked by the increase of the amount of industrial types, the amount of enterprise units, absorption of manpower, amount of investment an production and value added.

During the period of Pelita III the amount of industrial types have increased from 63 at the beginning of Pelita III into 87 types at the end of Pelita III. Compared with the beginning of Pelita III the types of industry have accrued as much as 38,10% or the average increase of 8,4% per year. Of the total number of these industries is not included the 20 types of industry of the people's handicrafts covering 3.700 units of enterprise with investment scale as big as Rp500.000 and less, which absorb labour force as many as 18.600 persons scattered in the rural areas. Besides that there is also found the development in the amount of enterprise units where at the end of Pelita III turns into 1.150 units. Doing so there is an increase of 78,85% or the annual average of 15,64%. This amount is not yet including the enterprise units of handicrafts enterprise in the rural areas.

From the aspect of labour force absorption in the industrial sector, in the first year Pelita III there have been absorbed a number of labour force of 3.122 persons increased into 26.959 persons at the end of Pelita III, so that there is an increase of 23.837 persons (763,52%) or te average increase of 71,42% per year.

This fact is caused by the middle of Pelita III there is an increase of investment through the development of 12 plywood industries and 1 industry of fishmill and 8 industries of sawmill that absorb many manpower in the frame of the domestic capital investment.

(b). Selama Pelita III terdapat serangkaian kebijaksanaan Pemerintah yang mendorong timbulnya beberapa industri berskala menengah yang menerap tenaga kerja, investasi serta mengundang kehadiran teknologi maju terutama didalam mendorong berdirinya pengolahan hasil hutan dan hasil laut. Sampai dari kebijaksanaan Pemerintah tadi hasilnya mulai dinikmati pada tahun terakhir Pelita dengan beroperasinya beberapa industri Plywood dan beberapa Industri Sawmill dalam skala menengah.

The amount of labour force absorption not included the manpower absorbption by the types of industries of the people's handicraft.

The investment on industrial sector in the first year of Pelita III is as big as 7.146.499.350 rupiahs, increases into Rp211.434.133.855 at the end of Pelita III, means there is an increase of Rp204.287.634.355 (2.858,57%) or the average of 133.22% per year. This increase is caused by the development of about 23 industries of mediocre scale since the middle of Pelita III besides the new development of industries of mediocre scale, including BRO.
See Tables III - 20, III - 21, III - 22 and III - 23

Tabel / *Table III — 20*

KEADAAN INDUSTRI SAMPAI AKHIR PELITA III DI MALUKU
THE SITUATION OF INDUSTRY TILL THE END OF PELITA III IN THE MOLUCCAS

Jenis Indikator *Types of Indicator*	Satuan *Units*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Jenis Industri/ *Number of types Industry*	Buah *unit*	63	70	73	84	87
Jumlah Unit Usaha/ *Amount of enterprise unit*	Buah *unit*	643	689	821	950	1.150
Jumlah Tenaga Kerja/ *Amount of labour force*	Orang *persons*	3.122	5.632	12.704	19.172	26.959
Jumlah Investasi/ *Amount of Investment*	Rp.	7.146.499.805	21.692.604.037	97.527.932.310	153.594.051.310	211.434.133.885
Nilai Produksi/*Production Value*	Rp.	—	7.180.732.000	7.892.392.000	8.731.224.000	9.113.448.000

Tabel / *Table III — 21*

PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL SELAMA PELITA III DI MALUKU
DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRY DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS

Jenis Indikator *Types of Indicator*	Satuan *Units*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah Jenis Industri/ *The amount of industrial types*	Buah *units*	50	54	54	65	66
2. Jumlah Unit Usaha/ *Amount of Enterprise units*	Buah *units*	602	668	776	884	1.078
3. Jumlah Tenaga Kerja/ *The amount of labour rorce*	Orang *persons*	3.450	3.877	8.756	10.866	11.394
4. Jumlah Investasi/ *The amount of investment*	Rp. *Rupiah*	6.051.425.600	6.116.526.587	7.966.932.904	26.275.642.904	34.555.574.486

Tabel / *Table III — 22*

PERKEMBANGAN NILAI PRODUKSI SEKTOR INDUSTRI SELAMA PELITA III DI MALUKU
THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION VALUE ON INDUSTRIAL SECTOR DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS

(dalam jutaan rupiah) / *(In Rp million)*

Sub.Sektor *Sub-Sector*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Industri Dasar/*The Basic Industry*	51,54	85,35	98,25	208,83	218,86
Aneka Industri/ *The Multi kinds of industry*	9.050,06	7.749,73	14.546,65	10.744,00	19.168,92
Industri Kecil/*Small industry*	14.910,00	16.120,00	16.160,00	18.230,00	17.710,12
J u m l a h / *T o t a l*	24.011,60	23.955,08	30.805,10	29.182,83	37.098,12

Tabel / *Table III — 23*

PERKEMBANGAN NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI SELAMA PELITA III DI MALUKU
THE DEVELOPMENT OF VALUE ADDED IN THE INDUSTRIAL SECTOR DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS

(dalam jutaan rupiah) / *(In Rp million)*

Sub Sektor *Sub Sector*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Industri Dasar/*Basic Industry*	7,22	11,95	13,75	29,24	30,64
Aneka Industri/ *Multi kinds of industry*	1.810,41	1.549,95	2.909,38	2.148,80	3.833,78
Industri Kecil/ *Small industry*	3.578,40	3.868,80	3.878,40	4.375,20	4.250,48
J u m l a h / *T o t a l*	5.396,03	5.430,70	6.801,53	6.553,24	8.114,50

(c). Mulai tumbuh dan berkembangnya wiraswasta-wiraswasta dalam masyarakat yang mempunyai dampak positif didalam akumulasi modal masyrakat pada usaha-usaha industri.

(d). Dalam rangka mendorong perkembangan sub sektor Industri Kecil, terdapat kemudahan-kemudahan dalam kredit perbankan serta dukungan bagi pengusaha kecil dalam rangka pelaksanaan Keppres 14, 14A, dan Keppres 18.

Bersamaan dengan tingkat perkembangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh sektor industri selama Pelita III, maka dalam memasuki Repelita IV sektor industri menghadapi berbagai masalah lama selama Repelita III maupun masalah-masalah baru, diperkirakan timbul dalam Repelita IV yang memerlukan pemecahan.

Khusus pembinaan untuk sentra industri kecil di Dati I Maluku sejak akhir Pelita III (1983/1984) sampai dengan tahun ketiga Pelita IV (1986/1987) berhasil dibina cabang industri pangan, sandang & kulit, kimia & bahan bangunan, kerajinan & umum dan logam sebanyak 95 sentra, dan meliputi 2.341 unit usaha serta tenaga kerja sebanyak 8.661 orang. Lihat Tabel III-24.

Tabel / *Table III — 24*

PERKEMBANGAN SENTRA INDUSTRI KECIL YANG DIBINA DI DATI I MALUKU 1983/1984 — 1986/1987 UNTUK CABANG INDUSTRI PANGAN, SANDANG KULIT, KIMIA & BAHAN BANGUNAN, KERAJINAN & UMUM DAN LOGAM

THE DEVELOPMENT OF SMALL INDUSTRIAL CENTRES PROMOTED IN THE PROVINCE OF MOLUCCAS DURING THE PERIOD OF 1983/1984 — 1986/1987

Tahun *Year*	Sentra *Centres*	Unit Usaha *Enterprise units*	Tenaga Kerja *Manpower*
1983/84	58	1.279	4.996
1984/85	58	1.381	5.343
1985/86	75	1.820	6.762
1986/87	95	2.341	8.661

3. Pertambangan dan Energi

Sektor Pertambangan dan Energi memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan Dati I Maluku. Sektor ini memberikan sumbangan cukup besar dalam menghasilkan devisa Negara. Terutama dari ekspor komoditi hasil tambang nikel, mangan dan lateritore.

Dalam Pelita III jumlah devisa yang dihasilkan sektor ini sebanyak US $ 64,76 juta yaitu 10,35% dari jumlah seluruh devisa yang dihasilkan dari daerah ini atau sebesar US$ 625,86 juta. Tidak termasuk komoditi hasil tambang minyak bumi.

Jika dalam Pelita III daerah Maluku hanya menghasilkan dua jenis bahan tambang yaitu minyak bumi dan bahan galian, maka dalam pelita III telah dihasilkan enam jenis bahan tambang yaitu minyak bumi, bahan galian bahan bangunan, belerang, nikel, mangan dan lateritore. Sebagian besar produksi hasil-hasil pertambangan ditujukan untuk ekspor sehingga perkembangan sektor ini sangat dipengaruhi oleh gejolak harga di pasaran dunia.

a. Minyak Bumi

Pertambangan minyak bumi di Dati I Maluku dilakukan oleh kontraktor Asing AAR dengan wilayah kerja di daratan dan lepas pantai pulau Seram dan Buru. Dewasa ini telah dirintis eksplorasi minyak bumi di lepas pantai pulau Aru oleh perusahaan swasta asing.

Untuk mengatasi kesulitan memperoleh bahan bakar minyak di Maluku terutama di daerah terpencil, maka disamping Depo BBM Ambon maka selama Pelita III telah dibangun 2 buah Depo BBM di Ternate dan Tual yang telah beroperasi sejak tahun 1980 dan 1982. Disamping itu dibangun 8 (delapan) buah sub Depo BBM masing-masing di Masohi, Namlea dan Bula yang telah beroperasi sejak tahun 1983 serta di Saumlaki, Dobo, Sanana, Labuha yang beroperasi sejak tahun 1984

Selain pembangunan Depo dan sub Depo BBM tersebut, kini sedang dijajaki pembangunan satu buah terminal BBM yang berlokasi di Pulau Ambon. Lihat Tabel III-25.

a. Produksi Pertambangan

Nikel

Eksplorasi biji nikel Pelita I dan II di Dati I Maluku dilakukan di Pulau Gebe seluas 118.790 Ha. Hasil eksplorasi membuktikan bahwa terdapat cadangan biji nikel sekitar 32 juta ton. Dalam Pelita III PT

The industrial sector shows an increase, either for the production value or for the value added, respectively as big as 54,50% and 50,39% during Pelita III or each undergoes an increase of 11,49% and 10,74% per year.

The increases in the production value and the value added are caused by a number of factors as follows :

(a) That the sum of companies from 643 units of enterprise in the first year of Pelita III, has increased into 1.150 units of enterprise at the end of Pelita III or undergoes an increase of 78,85%. The number concerned is the enterprise units that are actively producing and not yet included the handicraft industries which is scattered in the rural areas.

(b) During Pelita III there are a series of government policies that stimulate the existence of some mediocre industries that absorb labour force, investment, and invites the presence of sophisticated technology especially in the stimulation of the exploitation of forest products and sea products. Seen from the government's policies that the results have been able to be enjoyed in the last year of Pelita III by the operational activities of the plywood industry and some sawmill industry on the mediocre scale.

(c) The beginning of growth of private entrepreneurship in the society which have an positive impact in the accumulation of the society's capital in the industrial enterprises.

(d) Within the efforts to motivate the development of sub-sector of small industry, there are facilities in the banking credits and sustaining efforts by the small traders within the realization of the Presidential Decree no 14, 14 a and 18. Along wth the development rate and the results achieved by the industrial sector during Pelita III, then entering the Pelita IV the industrial sector is facing various old problems during Pelita III and also new problems that are estimated to appear and need to be solved immediately.

Especially for the center of the small industry in the province of Moluccas since the end of Pelita III (1983/1984) up till the third year of Pelita IV (1986/1987) there have been promoted branches of food industry, clothes and leather, chemical and construction materials, handicrafts and general, and metal as much as 95 centres covering 2.341 enterprise units and labour force as many as 8.661 persons. See Table III - 24.

3. Mining and Energy

The sector on mining and energy is playing a great role in the development of the province of Moluccas. This sector gives contribution of great significance in producing foerign exchange especially from the export commodities of nickels, mangan, and lateritores.

In Pelita III the amount of foreign exchange produced by this sector is as much as US $64,76 million, namely 10,35% of the whole foreign exchange produced by this region or as big as US $ 625,86 million, not including the commodities of the crude oil mining products.

If in the Pelita II the region of the Moluccas only produces two kinds of mining materials namely crude oil and mines, in Pelita III there have been produced 6 kinds of mining materials, namely crude oil, construction digged materials, sulphur, nickel, mangan, and lateritore. Most part of the mining production are destined for export so that the development of this sector is affected by the fluctuations of prices in the world market.

a. Crude Oil

The mining of crude oil in the province of Moluccas is done by foreign contractors AAR with the working areal on land and off-shore of the island of Seram and Buru. At present it has been pioneered the exploration of crude oil off-shore of the island of Aru by a foreign private company.

To overcome the difficulties to get fuel in the Moluccas, especially in the remote places, besides the depot of BBM in Ambon, during pelita III there have been established two depots of BBM (fuel) in Ternate and Tual, which have been in operation since the year 1980 and 1982. Besides that there have been established 8 sub-depots of fuel, respectively in Masohi, Namlea, Bula, which are already in operation since 1983, and in Saumlaki, Dobo, Sanana, Labuha, which are in operation since 1984.

Except the establisment of depots and sub-depots of BBM (fuel) mentioned above, now it is being surveyed about the establishment of BBM terminal that is located on the island of Ambon. See Table III - 25.

b. Mining Products

Nickel

Exploration of nickel ores in Pelita I and II in the province of Moluccas is done onthe island of Gebe as wide as 118. 790 ha. The exploration results proves that there is a reserve of nickel ores about 52 million ton. In Pelita III the PT Aneka Tambang has carried out activities on nickel mining to

Tabel / *Table III — 25*

KAPASITAS PENAMPUNGAN BBM PADA DEPO DAN SUB DEPO BBM DI MALUKU

CAPACITY FUEL RESERVOIR AT THE DEPOT AND SUB—DEPOTS OF FUEL IN THE MOLUCCAS

(dalam kilo liter) / *(in kiloliters)*

No	Depot/Sub Depot *Depot/SUb-Depot*	Solar *Diesel oil*	Premium *Premium*	M. Tanah *Kerosene*	Avtur *Avtur*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Depo Ambon/ *Depot of Ambon*	5.000	2.000	4.800	900
2.	Depo Ternate/ *Depot of Ternate*	1.100	1.100	2.200	500
3.	Depo Tual/ *Depot of Tual*	1.100	1.100	2.200	—
4.	Sub Depo Masohi/ *Sub-depot of Masohi*	190	95	95	—
5.	Sub Depo Namlea/ *Sub-depot of Namlea*	190	95	95	—
6.	Sub Depo Bula/ *Sub-depot of Bula*	190	95	95	—
7.	Sub Depo Tobelo/ *Sub-depot of Tobelo*	95	95	190	—
8.	Sub Depo Saumlaki/ *Sub-depot of Saumlaki*	190	95	95	—
9.	Sub Depo Labuha/ *Sub-depot of Labuha*	95	95	190	—
10.	Sub Depo Dobo/ *Sub-depot of Dobo*	95	95	190	—
11.	Sub Depo Sanana/ *Sub-depot of Sanana*	190	95	95	—
	Jumlah / *Total*	8.435	4.960	10.245	1.400

Aneka Tambang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penambangan biji nikel untuk diekspor. Namun akibat pasaran lesu, maka produksi nikel hanya mencapai sekitar 48% dari target yang direncanakan dan jumlah yang diekspor hanya mencapai 69% dari yang diproduksi dengan nilai US $ 63,69 juta. Lihat Tabel III-26.

Penambangan nikel dilakukan dengan sistem Open Pet dan Back/Side Filling serta Reklamasi termasuk penataan dan penghijauannya.

Mangan

Pada tahun 1980 Direktorat Teknik Pertambangan melakukan eksplorasi mangan untuk PT Nusa Triwijaya, walaupun PN Aneka Tambang pada tahun 1969 - 1970 dan PD Gama Karya tahun 1972 telah mengadakan kegiatan yang sama. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa kadar Mn 02 antara 35% sampai 86,65%, cadangan sekitar 584.751,43 ton, dengan perincian untuk proved ore, probable ore, possible ore berturut-turut sekitar 221.533,58 ton, 257.296,75 ton dan ± 105.921,10 ton.

Dari percobaan-percobaan yang dilakukan ternyata kadar Mn 02 dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 75%. Dalam perhitungan ternyata dari cadangan tersebut minable orenya sebanyak 436.254,40 ton. Dalam Pelita III biji mangan telah mulai ditambang dan diekspor dimana pada tahun 1982 dan 1983 masing-masing sebanyak 8.400 ton dan 17.670 ton ke Jepang, Taiwan dan Hongkong dengan nilai US $ 1.062.370,80.

Logam Dasar

Dalam Pelita III telah diadakan propeksi dan eksplorasi Logam Dasar di pulau Halmahera Timur dan pulau Bacan oleh sub Direktorat Mineral Logam, Direktorat Sumber Daya Mineral, Ditjen Pertambangan Umum dengan bantuan teknik dan tenaga ahli Jerman Barat pada tahun 1982. Dari Logam Dasar yang telah diketahui, yang tampak menonjol ialah unsur tembaga, tetapi disamping itu tak kurang menariknya ialah unsur ikutannya ialau Au (Emas).

Berdasarkan hasil dari contoh yang diperoleh dari parit-parit uji (sepanjang ± 5.000 m) dan jika mineralisasi seperti dipermukaan ternyata mencapai kedalaman 200 meter, maka diperkirakan endapan ini minimal dapat mempunyai cadangan sekitar 100 juta ton dengan kadar Cu 0,5% dan Au 0,3% gram/ton. Untuk mengetahui besarnya cadangan dan kadar Cu dan Au secara meyakinkan, maka eksplorasi telah ditingkatkan pada tahun 1983/1984 dengan pengeboran 10 buah sumur dengan tingkat kedalaman 2.000 meter.

be exported. Due to the sluggish marketing, however, the production of nickel has only reached about 48% of the target designed, and the sumbeing exported has only reached 69% of the total production with the value of US $ 63,69 million. See Talbe III - 26

Tabel / *Table III — 26*

PERKEMBANGAN PRODUKSI, REALISASI EKSPOR, DAN NILAI EKSPOR TAMBANG NIKEL PULAU GEBE SELAMA PELITA III

DEVELOPMENT OF PRODUCTION, EXPORT REALIZATION, AND EXPORT VALUE OF NICKEL MINING ON THE ISLAND OF GEBE DURING PELITA III

No	Tahun *Year*	Produksi (Ton) *Production (tons)*	Realisasi Produksi (Ton) *Production Realization (tons)*	Volume Ekspor (Ton) *Export Volume (tons)*	Nilai (US $) *Value (US $)*
1.	1979	1.000.000	800.000	259.197,68	7.288.181,39
2.	1980	1.200.000	1.000.000	473.937,80	18.997.413,30
3.	1981	1.300.000	1.200.000	552.102,24	19.625.629,06
4.	1982	1.300.000	—	409.698,90	11.518.888,94
5.	1983	1.500.000	—	375.705,00	6.263.028,72
	Jumlah / *Total*	6.300.000	3.000.000	8.070.641,62	63.693.141,41

Nickel mening is done with the system of Open Pet and Back/Slide Filling and reclamation including the rearrangement and regreening.

Mangan

In the year 1980 the Directorate of Technique of Mining has done an exploration on mangan for PT Nusa Triwijaya, although the PN Aneka Tambang in the year 1969 - 1970 and PD Gama Karya in the year 1972 have done the same activities. The results of exploration shows that the mangan quality MN 02 between 35% till 86, 65%, the reserves about 584.751,43 tons, with the details for proved ore, probable ore, possible are respectively about 221.533,58 tons, 257.296,75 tons and approximately 105.921,10 tons.

From the experiments that have been done it turns out that the quality of MN 02 can be enhanced into the average of 75%. In the calculation it turns out from the reserve concerned its minable ore is as much as 436.254,40 tons. In Pelita III the mangan ore has been explored and exported, of which in the year 1982 and 1983 each as much as 8.400 tons and 17.670 tons to Japan, Taiwan, and Hongkong with the value of US $ 1.062.370,80.

Basic Metal

In Pelita III there has been done a pre-survey and exploration of basic metal on the island of Halmahera, the northeastern part of it, and the island of Bacan, by the Sub-Directorate of Mineral Metals, the Directorate of Mineral Resources, Directorate General of General Mining, with the technical asistance of experts from West Germany in the year 1982. From the basic metals already known, the mosth remarkable is the copper elements, but except that it is also interesting about the auxiliary elements namely Au (gold).

Based on the results of the samples attained from the experiment ditches (about 5000 m) and if the mineralization as in the surface turns out reached the depth of 200 m, then it is estimated that the sediment minimal able to yield reserves of about 1 million tons with the quality of Cu 0,5% and Au 0,3 gram per ton. To know the amount of reserves and the quality of Cu and Au in an convincing manner, then the exploration has been enhanced in the year 1983/1984 with the boring of ten wells with the depth rate of 2000 m.

Sulphur

The activities of the sulphur explorationon the island of Damar has been done by CV Kalisari in the year 1980. From the results of exploration it turns out the supply of reserves reaches about 249.899,5 tons, with the quality of sulphur 99,86%. In the Pelita III it is already producing and being traded in the homeland.

Construction Mining Materials

The explorationof construction mining materials is most done in a simple manner with small products quantity, to produce gravels, sands, clay, limestone, and the like. There is still no government regulation on the exploration of mining sch materials, so that the total production is difficult to monitor, also the digging system outside the government supervision can disturb the harmony of the living environment. In Pelita III an iventarization has been done on mining materials on the island of Ambon, Haruku, and Halmahera.

Belerang

Kegiatan eksplorasi belerang di pulau Damar telah dilakukan oleh CV Kalisari pada tahun 1980. Dari hasil eksplorasi ternyata besar cadangan mencapai sekitar 249.899,5 ton, dengan kadar belerang 99,86%. Dalam Pelita III sudah mulai berproduksi dan dipasarkan dalam negeri.

Bahan Galian Bahan Bangunan

Pengusahaan bahan galian bahan bangunan banyak dilakukan secara sederhana dengan produksi kecil-kecilan, untuk menghasilkan batu kerikil, pasir, lempung, batu kapur dan lain-lain. Belum ada Peraturan Daerah tentang penambangan bahan galian tersebut, sehingga jumlah produksi sulit diketahui, serta pengambilan yang tidak diawali dapat mengganggu keseimbangan tata lingkungan. Dalam Pelita III telah diadakan inventarisasi bahan galian di pulau Ambon, Haruku dan Halmahera.

Bahan-bahan Galian Lain

Selain bahan-bahan galian tadi masih terdapat bahan-bahan galian lain yang belum dieksplorasi antara lain Chrom di pulau Halmahera, Pasir Besi di pulau Moa, Kwarsit di pulau Taliabu, Mangan di pulau Buru, Garam di pulau Yamdane, Perlit di kampung Podol Kecamatan Ibu pulau Halmahera, Talk di Desa Fayaul Halmahera Tengah, Asbes di Weda, Gane, Kaolin di Halmahera, batu gamping untuk bahan batu semen di Seram dan Buru.

Geologi

Pemetaan geologi bersistem dilakukan oleh Direktorat P3G hampir di seluruh daerah Maluku. Peta geologi yang akan dihasilkan berskala 1 : 250.000. Peta semacam ini dapat dipakai sebagai referensi; sedangkan untuk dipakai sebagai Peta Dasar dan "Peta Kerja" diperlukan Peta geologi yang berskala 1 : 50.000 atau 1 : 25.000.

Penyelidikan gunung berapi dilakukan Direktorat Vulkanologi. Daerah-daerah gunung berapi adalah daerah Busur Banda Dalam yang terdiri dari pulau Damar, Teon, Nila, Serua, Manuk, Banda dan Lengkung Halmahera yang terdiri dari Halmahera Utara Barat, pulau Ternata, Tidore dan Makian. Dalam Pelita III telah dibangun tiga buah pos pengintai ialah di pulau Banda, Makian dan Ternate. Masalah yang dihadapi ialah kekurangan tenaga terampil yang akan ditempatkan pada pos-pos pengintai tersebut.

Melihat pada keadaan dan masalah pertambangan di Maluku tadi, maka tujuan dan sasaran sektor pertambangan dalam Pelita IV ialah: (1) Mengusahakan kelangsungan dan peningkatan produksi bahan tambang yang saat ini telah mempunyai pasaran baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga penerimaan Negara akan semakin meningkat, (2) Mengembangkan penyediaan bahan baku untuk industri, (3) Penganekaragaman produksi pertambangan dan (4) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan rakyat.

Kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh dalam pelita IV di sektor pertambangan adalah memantapkan dan melanjutkan serta mengusahakan peningkatan hasil-hasil pertambangan yang telah dicapai dalam Pelita III dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

b. Energi

Konsumsi energi di Dati I Maluku berasal dari energi komersil minyak bumi dan energi non komersil kayu bakar. Energi minyak bumi terutama digunakan dalam bidang usaha perlistrikan, perindustrian, perhubungan laut, perhubungan darat, keperluan rumah tangga, teristimewa untuk memasak di daerah perkotaan dan penerangan di daerah pedesaan.

Tahun 1981/1982 kebutuhan BBM naik sebesar 36% dibanding kebutuhan tahun 1980/1981. Tahun 1982/1983 kebutuhan BBM menurun sekitar 11% dari kebutuhan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena dalam tahun 1982/1983 terjadi harga Bahan Bakar Minyak, kenaikan rata-rata konsumsi energi minyak bumi sebesar 12% per tahun. Sedangkan energi kayu bakar hanya 2,9% per tahun. Dengan semakin bertambahnya kegiatan ekonomi dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan kebutuhan akan energi minyak bumi akan terus meningkat.

Di beberapa pulau di Maluku terdapat sungai dengan air terjun dan panas bumi dari proses magnetik yang dapat dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Disamping itu iklim tropis memungkinkan pemanfaatan segala aspek tenaga panas matahari, baik untuk pemanasan, pembangkit tenaga listrik, mekanis (angin) biogas maupun kimia (thermalchemica). Juga tenaga air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Dan panas bumi akan dikembangkan dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah.

Other Mining Materials

Except those mining materials mentioned above there are still other mining materials that have not yet been explored among others chrom on the island of Halmahera, quartz on the island of Moa, quarsit on the island of Taliabu, mangan on the island of island of Buru, salt on the island of Yamdane, perlit in the village of Podol sub-district of Ibu on the island of Halmahera, powder in the village of Fayaul in Central Halmahera, asbest in Weda, Gane, kaolin in Halmahera, limestone for cement raw materials in Seram and Buru.

Geology

The mapping of systematic geology is done by the Directorate P3G nearly throughout the whole area of Moluccas. The geological map that should be produced is of 1 : 250.000 scale. The map such as this can be used as a reference, while for the use of basic map and working map, we need geological map that is of 1 : 50.000 scale or 1 : 25.000 scale.

The survey on volcanoes is done by the Directorate of Vocanology. The regions of volcanoes are the region of internal Banda bow consisting of the island of Damar, Teon, Nila, Serua, Manuk, Banda, and the Halmahera curve consisting of the western part of North Halmahera, the island of Ternate, Tidore, and Makian. In Pelita III there have been built up three observatory posts namely on the island of Banda, Makian and Ternate. The problems faced are the lack of skilled experts that can be appointed in those observatory posts concerned.

Looking at the situation and the problems on mining in the Moluccas, the aim and objectives of the mining sector in Pelita IV is : (1) To do efforts for the continuation of mining products and the acceleration of it that up till now has alreay good marketing, either in the domestic marketing or in the goreign marketing, so that the income of the state can be accrued. (2) To develop the supply of raw materials for the industry ; (3) To make multipurpose production of mining, and (4) to increase the supply of job opportunities and the population's income.

The policies and steps taken in Pelita IV in the mining sector is to consolidate, continue and improve the results gained in Pelita III by using efficient and sohisticted technology.

b. Energy

The consumption of energy in the province of Moluccas is derived from the commercial energy of crude oil and the non commercial energy from fire wood. The energy of crude oil in particular is used in the field of generating electricity, industry, maritime, land communication, household necessities, especially for the purpose of cooking in the urban areas and light for the rural areas.

In the year 1981/82 the needs of BBM fuel increases 36% compared with the needs in 1980/1981. In the year 1982/1983 the needs of BBM fuel declines about 11% compared to the needs beforehands. This fact is caused by the reason that in the year 1982/1983 an increase of price has taken place BBM fuel, a rise avarage in the consumption on crude oil as much as 12% per year. Meanwhile the consumption of fire wood rises only 2,9% per year. By the more blooming of the economical activities in the years to come it is estimated that the needs for energy in oil will be continually increasing.

On some islands in the Moluccas there are found a number of waterfalls and natural geothermals with magnetic process that can be utilized for electric energy. Besides that the tropical climate open many possible aspects for the utilization of solar energy, either for the purpose of warmth, electric generator, (wind) mechanism, biogas and chemical (thermachemical). also the water energy can be utilized for electric generator in the micro hydro power station. The geothermal energy can be developed along the aggregate development of the region.

In the last year of Pelita III has been built up three units of demonstrative location on the utilization of biogas on the island of Ambon by the Directorate of Energy in close cooperation with the Technical Faculty of Patimura University. Besides that by the Directorate of Rural Development there have been built three units of demonstration of solar energy to generate energy for pumping of drinking water in three villages on the island of Ambon and Saparua.

The use of non-commercial energy in the Moluccas for example the firewood still plays an important role as the energy material especially for the purpose of household necessities and rural industries. The main problem is of the lack of firewood on the islands densely populated and in the surroundings of urban areas, can be urgently felt. This fact is one of the reason why the river banks are becoming bald, the areas around the water sources, and the mountain slopes, so that it reduces the water debit, causing erosion and flood.

The aim and objectives of the development of electric energy in the Moluccas is the supply of electric current in equitable distribution for the urban and rural society in sufficient amount and good quality and for reasonable price so that it can be achieved by the public besides the increase of electrical us for industry.

Dalam tahun terakhir Pelita III telah dibangun 3 unit peragaan pemanfaatan biogas di pulau Ambon oleh Direktorat Ketenagaan yang bekerjasama dengan Fakultas Teknik UNPATTI, selain itu oleh Direktorat Bangdes dibangun 3 unit peragaan pemanfaatan tenaga matahari untuk menjalankan pompa air pada tiga desa di pulau Ambon dan Saparua.

Pemakaian jenis energi non komersil di Maluku misalnya kayu bakar masih memegang peranan penting sebagai bahan energi khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan industri pedesaan. Yang menjadi masalah adalah kekurangan kayu bakar di pulau-pulau yang padat penduduknya dan sekitar kota sangat terasa. Hal ini merupakan salah satu akibat gundulnya tepi sungai, daerah sekitar sumber air dan lereng gunung, sehingga menurunkan debit air, mengakibatkan erosi dan banjir.

Tujuan dan sasaran pembangunan tenaga listrik di Maluku adalah tersedianya tenaga listrik secara merata untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik, serta dengan harga yang wajar sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat banyak disamping adanya peningkatan penggunaan listrik untuk industri.

Sampai dengan Pelita III jumlah unit Pembangkit Tenaga Listrik yang terpasang oleh PLN sebanyak 71 buah dengan daya 28.059 KW, oleh swasta dan industri non PLN 130 buah dengan daya 39.255,5 KW, oleh masyarakat desa 109 buah dengan daya 583,5 KW. Lihat Tabel III-27 dan III-28.

Tabel / *Table III — 28*

JUMLAH UNIT DAN DAYA TERPASANG DALAM PELITA II
THE AMOUNT OF UNITS AND SUPPLY CAPACITY IN PELITA II

No Urut	Jumlah Unit *Amount of Units*	Daya Terpasang *Supplya Capacity*	Dikelola Oleh *Managed by*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	31	12.472 KW	PLN
2.	113	4.255 KW	Swasta + Instansi Non PLN *Private and non-PLN Institutions*
3.	93	478 KW	Masyarakat Desa *Rural Society*

Kenaikan rata-rata per tahun dalam Pelita III untuk unit mesin dan daya terpasang berturut-turut 25,80% dan 25% oleh PLN, 3% dan 64,6% oleh swasta/instansi non PLN 2,4% dan 4,4% oleh masyarakat. Kenaikan rata-rata daya terpasang per tahun yang cukup besar oleh swasta disebabkan karena dalam tahun terakhir Pelita III muncul instansi-instansi besar yang memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri, sebaliknya kenaikan rata-rata daya terpasang per tahun oleh masyarakat cukup kecil disebabkan kemampuan masyarakat yang belum memadai untuk memiliki pembangkit tenaga listrik sendiri.

Sampai akhir Pelita III sudah 40 desa yang dialiri listrik oleh PLN. Sedangkan sampai dengan akhir Pelita II jumlah produksi sebesar 26.204,677 KWH yang disalurkan kepada 21.406 langganan, berarti terjadi kenaikan rata-rata per tahun selama Pelita III untuk produksi 15,34% dan untuk langganan 21%.

Daya terpasang oleh PLN dalam Pelita III hanya sebesar 28.059 KWH, berarti mencapai 63% dari target yang direncanakan. Hal ini disebabkan keterlambatan penyebaran dan pemasangan mesin yang berasal dari LON Belanda. Dalam pelaksanaan listrik masuk desa, target Pelita III adalah 37 lokasi meliputi 35 buah kecamatan yang akan dialiri listrik.

Namun sampai tahun keempat Pelita III sebanyak 24 lokasi telah berfungsi dimana terdapat 40 desa yang telah dialiri listrik dengan 5.123 langganan, sedangkan sisanya dalam tahap penyelesaian. Dibanding dengan akhir Pelita II desa yang telah dialiri listrik sebanyak 21 dengan 1.153 langganan, suatu kenaikan sebesar 23,96% setiap tahun untuk desa yang telah dialiri listrik dan 45,18% untuk jumlah langganan.

Jumlah daya terpasang seluruhnya sampai dengan Pelita III 67.900 KW, atau rata-rata 48,50 Watt/kapita. Suatu kenaikan 223,33% jika dibandingkan dengan Pelita II yang hanya mencapai 15 Watt/kapita. Ini berarti kenaikan rata-rata sebesar 26,45% dari rencana kenaikan kebutuhan tenaga listrik dalam Pelita III yang ditargetkan 29% setiap tahun.

Adapun tenaga listrik yang diusahakan oleh PLN Eksploitasi IX Maluku pada tahun 1984 ialah terdiri dari jumlah mesin 74 buah, meningkat tahun 1985 menjadi 82 buah, Daya Terpasang tahun 1984, 29.400 KW, tahun 1985 menjadi 30.574 KW, kemudian Daya Mampu

Up till Pelita III the amount of units of electric generators installed by the PLN (the State Owned Electric Enterprise) as many as 71 units with the capasity of 28.059 kw, by the private and industrial enterprise non-PLN as many as 130 untit with the capacity of 39.255,5 kw, by the village society 109 units with the capacity of 585,5 kw. See Table III-27 and III-28.

Tabel / *Table III — 27*

JUMLAH PLTD DI MALUKU DIPERINCI MENURUT LOKASI, DAYA TERPASANG DAN DAYA MAMPU SELAMA PELITA III
THE AMOUNT OF ELECTRIG GENERATOR IN THE MOLUCCAS DETAILED ACCORDING TO THE LOCATION, THE SUPPLY CAPACITY, AND THE EFFECTIVE CAPACITY DURING PELITA III

No	Lokasi *Location*	Jumlah Unit *Amount of Units*	Daya Terpasang (KW) *Supply Capacity (Kw)*	Daya Mampu (KW) *Effective Capacity (Kw)*	Dikelola oleh *Managed by*
1.	Ambon Batu Gajah	7	5.244	4.225	PLN
2.	Ambon Hative Kecil	3	7.872	7.200	PLN
3.	Masohi	5	674	530	PLN
4.	Tual	6	554	500	PLN
5.	Tulehu	3	260	215	PLN
6.	Saparua	5	1424	1283	PLN
7.	Haruku	2	120	108	PLN
8.	Hitu	2	200	190	PLN
9.	Kairatu	2	80	80	PLN
10.	Namlea	2	234	210	PLN
11.	Banda	2	234	200	PLN
12.	Luhu	2	140	140	PLN
13.	Saumlaki	2	234	200	PLN
14.	Piru	2	234	200	PLN
15.	Bula	2	234	200	PLN
16.	Wahai	1	117	100	PLN
17.	Dobo	2	234	220	PLN
18.	Ternate Kota	5	2.080	1.300	PLN
19.	Ternate Kayu Merah	2	6.560	6.560	PLN
20.	Soa Siu	5	394	352	PLN
21.	Sanana	2	234	200	PLN
22.	Labuha	2	234	208	PLN
23.	Tobelo	2	234	220	PLN
24.	Jailolo	2	234	110	PLN
25.	Tersebar	130	39.255,5	34.348,56	Swasta + Non *Private and non PLN*
26.	Tersebar	109	585,5		468,40 Masyarakat Desa *The rural society*
	Jumlah / *Total*	309	67.900,0	59.567,96	

The increase average per year in Pelita III for the engine units and supply capacity respectively 25,80% and 25% by the PLN, 3% and 64,6% by the private/non PLN institutions, 3,4% and 4,4% by the society. The average increase of the supply capacity per year which is great enough by the private enterprise caused by the fact that in the last year of Pelita III appears big institutions which are in the possession of electric generators of their own, on the contrary the average increase of the supply capasity per year by the society is sufficient less, due to the society's ability is not yet adequate to possess his own electric generator.

Up till the end of Pelita III there have been 40 villages supplied by electricity by the PLN. Up till the end of Pelita II the amount of production as big as 26.204,677 KwH distributed to 21.406 customers, means there is an increase of annual average during Pelita III for the production of 15,34% and for the customers 21%.

The supply capacity by the PLN in Pelita III is only 28,059 KwH means reaches 63% of the target stipulated before. This fact is caused by the late coming of the motors engine and the installation derived from the LON Holland. In the realization of rural electrification, the target of Pelita III is 37 locations covering 35 sub-districts that should be supplied by the electricity.

Nevertheless up till the fourth year Pelita III as many as 24 locations are functioning where 40 villages have been supplied by electricity with 5.123 customers, while the rest are in the stage of finishing. Compared to the end of Pelita II the villages having been supplied by electricity as many as 21 villages wth 1.153 customers, an increase of 23,96% per year for the villages having been supplied with electricity and 45,18% for the amount of customers.

The amount of total supply capacity up till Pelita III 67.900 Kw, or the average of 48,50 Watt per capita. An increase of 223,33% if compared with

tahun 1984 sebanyak 24.681 KW, meningkat menjadi 24.912 KW pada tahun 1985. Sedangkan untuk beban puncak pada tahun 1984 sebanyak 13.292 KW, juga meningkat menjadi 15.206 pada tahun 1985. Jumlah gardu distribusi ada 245 buah pada tahun 1984 dengan KVA dan pada tahun berikutnya menurun menjadi 234 buah gardu dengan KVA sebesar 28.005.

Mengenai jumlah langganan di 27 lokasi pada tahun 1984 ada sebanyak 30.474, KVA tersambung oleh para langganan ada 29.432.420, dan tahun 1985 meningkat menjadi 35.658.010.

Jumlah produksi pada tahun 1984 sebanyak 54.767.347 KW, dan KW Terjual pada tahun 1984 sebanyak 38.372.247, juga meningkat pada tahun 1985 menjadi 42.305.733 KW.

Keadaan transmisi distribusi perlistrikan yang dikelola PLN pada akhir tahun keempat Pelita III adalah berupa JTM 119.148 M, kabel JTR 168.102 M, Travo 20,620 KVA, sedangkan pada tahun terakhir Pelita II, kabel JTM ada sebanyak 76.337 M, kabel JTR sebanyak 143.436 M, dan Travo sebanyak 10.022 KVA, suatu kenaikan rata-rata per tahun dalam Pelita III sebesar 11,77 untuk JTM, 4,05% JTR dan Travo sebesar 19,77%.

Pembangunan tenaga listrik di Dati I Maluku selalu berkaitan dengan masalah penyediaan sumber energinya yang diusahakan melalui diversifikasi energi. Untuk itu dalam Pelita III telah diadakan survey pemanfaatan tenaga air di Kao untuk pusat tenaga listrik mini hidro. Dan kegiatan penelitian yang tercatat dalam Maluku Long Tange Power Study telah selesai dikerjakan dan telah menghasilkan suatu Rencana Pengembangan Tenaga Listrik di Maluku sampai dengan tahun 1994.

4. Perhubungan

Sejak Pelita I sampai dengan akhir Pelita III hasil pembangunan di bidang prasarana jalan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sehingga memperlancar arus distribusi barang dan jasa serta mobilitas manusia.

Dalam Pelita III pembangunan di bidang jalan diutamakan pada peningkatan jaringan jalan yang meluas keseluruh pulau-pulau besar dan kecil di Maluku. Sehingga jalur jalan tersebut telah mencapai 2.929 Km yang terdiri dari jalan aspal sepanjang 940,556 Km, jalan kerikil 54,4 Km dan jelas AWCAS/Tanah sepanjang 1.292,544 Km.

Sebagian besar dari jaringan jalan tersebut sudah dalam keadaan baik dan beraspal terutama jalan Negara (seluruhnya masih terdapat jalan-jalan berkerikil dan jalan tanah terutama jalan Kabupaten.)

Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pelaksanaan program-program selama Pelita III yaitu :

(a) Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah berhasil direhabilitasi yaitu jalan sepanjang 619,324 Km dan jembatan 21 M.
(b) Program penunjangan jalan dan jembatan yaitu jalan sepanjang 1.648,1 Km dan jembatan 2.527 M.
(c) Program pembangunan baru jalan tanah sepanjang 84,3 Km dan jalan AWCAS 1.040,2 Km.
(d) Program peningkatan jalan sepanjang 633,9 Km.
(e) Program pembangunan/penggantian jembatan dengan tebal bentangan 4.431,42 M. Lihat Tabel III-29.

Tabel / *Table III — 29*

PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET FISIK SELAMA PELITA III
THE PERCENTAGE OF PHYSICAL TARGET ACHIEVEMENT DURING PELITA III

No	Program/Kegiatan *Programs/Activities*	Target Fisik (Km) *Physical Target (km)*	Realisasi (Km) *Realization (km)*	Realisasi (%) *Realization (%)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rehabilitasi & pemeliharaan jalan & jembatan/ *Rehabilitation and maintenance of roads and bridges*	1.195	619,324	51,8
2.	Penunjangan jalan dan jembatan/ *Sustaining roads and bridges*	1.380	21	
			1.648,1	194
		850	2.527	
3.	Peningkatan jalan/*Road betterment*	60	633,9	1.056,5
4.	Penggantian jembatan *Bridges substitution*	320	4.431,42	1.384,8
5.	Pembangunan jalan baru/ *New roads constructions*	170	4.431,42	2.606,7

the Pelita II that reaches only 15 Watt per capita. This means that the average increase of 26,45% of the planned increase of electric needs in Pelita III that has been target 20% per year.

The electric energy managed by the PLN Exploitation IX Moluccas in the year 1984 is consisting of the amount of engines 74 units, increases in the year 1985 into 82 units, the supply capacity in 1984 is 29.400 Kw, in 1985 becomes 30.574 Kw, then the effective capacity in the year 1984 as much as 24.681 Kw, increases into 24.912 Kw in the year 1985. Meanwhile for the top burden in the year 1984 as many as 13.292 Kw, increases into 15.206 in the year 1985. The amount of auxiliary generating stations are 245 units in the year 1984 with KVA and the next year declines into 234 units with KVA as much as 28.025.

Concerning the amount of customers in 27 locations in the year 1984 as many as 30.474, KVA connected by the customers are 29.432.420, and in the year 1985 increases into 35.658.010.

The amount of production in the year 1984 as much as 54.767.347 Kw, and the sold Kw in the year 1984 as much as 38.372.247, also increases in the year 1985 into 42.305.733 Kw.

The situation of transmission, distribution of electrification which is managed by the PLN at the end of the fourth year of Pelita III is in the form of JTM wire 119.148 m, JTR wire 168.102 m, Travo 20,620 KVA, while at the end of the last year of Pelita II the JTM wire is 76.337 m, the JTR wire is 143. 436 m, Travo 10.022 KVA, an average increase per year in Pelita III as much as 11,77% for JTM, 4,05% for JTR wire, and Travo 19,77%.

The development of electric energy in the province of Moluccas always in connection with the problems of supply of the energy sources which are attained by diversification of energy. For this purpose in Pelita III there has been carried out a survey on utilization of water energy in Kao as the central electric energy of mini hydro. The activities on research recorded in the Moluccas Long Range Power Study has been finished and has produced a development planning on electric energy in the Moluccas till the year 1994.

4. Communication

Since Pelita I till Pelita III the results of development in the field of transportation infrastructure have given great benefits to the society so that it causes the fluent flow of goods and service distribution and human mobility.

In Pelita III the development in roads is emphasized on the acceleration of roads network that is extensified to all the great and small islands in the Moluccas, so that the roads have reached 2.929 km consisting of asphalt road as long as 940,556 km, gravel roads 54,4 km and AWCAS/land roads as long as 1.292,544 km.

A great part of the roads network have been already in good condition and are provided with asphalts especially the state reads (on the whole there are still roads provided with gravels and land roads especially the district roads).

The increase of the roads is due to the existence of the program realization as long as Pelita III namely :

(a) Programs on the rehabilitation of roads and bridges that have been successful rehabilitated as long as 619,324 km and bridges 21 m.
(b) Programs on sustaining the roads and bridges, each 1.648,1 km, and 2.527 m.
(c) Programs on new roads development, land roads as long as 84,3 km and the road AWCAS 1.040,2 km.
(d) Programs on roads betterment as long as 633,9 km.
(e) Program on development / substitution of bridges with length of 4.431,42 m.

a. Land Communication

Infrastructure for land communication increases parallel with the volumes of goods and passengers. This development can be seen from the amount of vehicles which is increasing on the average of 22,64 % per year.

The same case is it with the vehicles under compulsory inspection at the end of Pelita III having the amount of 3.924 vehicles for passengers transportation, which means during Pelita III the amount of vehicles on compulsory inspection has increased with the average of 18,67 %. See Table III - 30.

The amount of vehicles on compulsory inspection in the year 1985 are as many as 2.705 units, consisting of goods motorcars as man as 2.275 units, buses 364 units, passengers cars 63 units.

By the broadening of the roads network that have been constructed to the remote places of production centres, we can see increasing spirit to enter the rural areas.

To secure the safety of the roads users, during Pelita III there have been succeeded in the realizationof roads facilities on the traffic roads namely the

a. Perhubungan Darat

Sarana perhubungan darat meningkat sejalan dengan volume barang dan penumpang. Perkembangan ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang meningkat rata-rata 22,64% setahun.

Demikian pula halnya dengan kendaraan wajib uji yang pada akhir pelita III berjumlah 3.924 buah kendaraan angkutan penumpang, yang berarti selama Pelita III jumlah kendaraan wajib uji telah meningkat dengan rata-rata 18,67%. Lihat Tabel III-30.

Tabel / *Table III — 30*

PERKEMBANGAN JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI DI PROPINSI MALUKU SELAMA PELITA III

DEVELOPMENT OF VEHICLES ON COMPULSORY INSPECTION IN THE MOLUCCAS DURING PELITA III

(x 1 buah) / *(in units)*

No	Tahun *Year*	Jumlah Kendaraan Wajib Uji / *The amount of vehicles on compulsory inspection* Mobil penumpang *Passengers cars*	Mobil bis *Buses*	Mobil barang *Goods motorcars*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1979	106	495	1.908	2.509
2.	1980	162	684	2.399	3.245
3.	1981	169	806	2.923	3.898
4.	1982	179	905	3.545	4.629
5.	1983	180	969	3.924	5.073

Sedangkan jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 1985 sebanyak 2.705 buah terdiri dari mobil barang sebanyak 2.275 buah, mobil bis 364 buah dan mobil penunjang sebanyak 63 buah.

Dengan melebarnya jaringan jalan yang telah dibangun ke pelosok desa yang merupakan pusat produksi, maka terlihat adanya kegairahan yang meningkat untuk memasuki daerah pedesaan.

Untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan, selama Pelita III telah berhasil dilaksanakan peningkatan fasilitas lalu lintas jalan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 330 buah tersebar di Pulau Ambon, Pulau Saparua, Masohi, Ternate, Tual dan Tidore, pembangunan unit pengujian kendaraan bermotor di Passo, pemasangan 6 Intersection Traffic Light di Ambon dan Ternate serta pengecetan permukaan jalan (Marka) sepanjang 6.500 M di Ambon.

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka realisasi pelaksanaan dalam Pelita III masih jauh dari apa yang diharapkan, karena pemasangan rambu jalan hanya mencapai 22%.

Guna menunjang peningkatan fungsi jalur jalan darat, efisiensi pengangkutan dalam upaya pembentukan suatu pola perhubungan yang terpadu di daerah Maluku, maka peranan angkutan penyeberangan Ferry sangat penting.

Peningkatan dan pembangunan fasilitas angkutan penyeberangan meliputi pengembangan armada, peningkatan fasilitas dermaga dan terminal. Hasil-hasil yang dicapai sejak Pelita II adalah pada lintas penyeberangan ferry Galala-Poka beroperasi 1 buah kapal Ferry Galala berbobot 80 DWT, yang mempunyai daya angkut kendaraan sebanyak 8 buah dan 50 tempat duduk penumpang.

Dalam tahun 1983 dengan crash program telah ditambah 1 buah kapal Ferry KMP Sepat berbobot 80 DWT, yang melayani lintas ini dengan daya angkut kendaraan sebanyak 8 buah dan kapasitas 72 tempat duduk penumpang.

Jumlah kendaraan yang dilayani setahun pada lintas Ferry Galala-Poka dalam tahun 1982 telah mencapai 182.688 buah dan penumpang 405.928 orang dengan peningkatan jumlah kendaraan selama Pelita III sebanyak rata-rata 4% per tahun dan penumpang sebanyak 30,8% per tahun. Lihat Tabel III-31.

Dari target pembangunan fasilitas lintasan penyeberangan ferry dalam Pelita III sebanyak 8 lintasan, hanya satu lintasan yang kini dalam tahap pelaksanaan dermaga/terminal yaitu lintasan Wainuru—Waipirit (Waai—Kairatu) sarana armadanya telah ada, yaitu KMP Mujair berbobot 150 DWT dengan 50 tempat duduk dan kendaraan 14 buah.

b. Perhubungan Laut

Sampai dengan akhir Pelita III tercatat di daerah maluku, 79 pelabuhan besar dan kecil yang dihubungkan dengan alur pelayaran sepanjang 3.250 mil. Dari 79 buah pelabuhan tersebut hanya 50 buah pelabuhan yang mempunyai fasilitas dermaga dan 15 diantaranya memiliki fasilitas pergudangan. Selain itu baru 31 buah pelabuhan yang sudah ditempatkan Petugas Dirjen Perla.

setting of traffic signals as many as 330 scattered in the island of Ambon, the island of Saparua, Masohi, Ternate, Tual and Tidore, construction of units for inspection of motor vehicles at Paso, setting of 6 intersection traffic lights in Ambon and Ternate, and the painting of road surface sign marks as long as 6.500 m in Ambon.

Compared with the target decided the realization of Pelita III is far from what has been expected, because the setting of road signs only reach 22%.

To sustain the enhancement of function of land roads, the efficiency of transportation in the efforts of forming an integrated pattern of communication in the Moluccas, therefore the role of ferry transportation is very important.

The enhancement and construction of facilities for cross-over transportation covering the fleet, the enhancement of pier facilities and terminals. The results achieved since Pelita II is the over-crossing of ferry Galala - Poka carried out by one ferry boat Kmf Galala with the heavy weight of 80 DWT, which has a transportation capacity for 8 vehicles and 50 passengers seats.

In the year 1983 with the crash program one ferry boat has been added Kmf Sepat with heavy weight of 80 DWT to serve the over-crossing with transportation capacity of 8 vehicles and 72 passengers seats.

The amount of vehicles served in a year in the ferry crossing between Galala - Poka in the year 1982 reaches 182.608 vehicles while for the passengers 405.982 persons, by the increase of vehicles amount as long as Pelita III as many as the average of 4% a year and the passengers 30,8 % per year. See Table III - 31.

Tabel / *Table III — 31*

PERKEMBANGAN JASA FERRY LINTASAN GALALA POKA SELAMA PELITA III

THE DEVELOPMENT OF FERRY CROSSING GALALA—POKA DURING PELITA III

No.	Tahun *Year*	Jumlah Kendaraan (buah) *Amount of vehicles*	Jumlah Penumpang (orang) *Amount of passengers*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1979	162.964	181.441
2.	1980	175.296	411.842
3.	1981	116.446	363.377
4.	1982	182.688	405.928
5.	1983	278.460	464.568
6.	1984	—	—
7.	1985	443.114	865.503

From the development target in the facilities of ferry crossing in Pelita III as many as 8 crossing localities, only one which is in the making of pier / terminal, namely a between Wainuru - Waipirit (Waai - Kairatu) the infrastructure for the fleet is already in supply, namely the Kmp Mujair with heavy weight 150 DWT with the capacity of 50 seats and 14 vehicles.

b. Sea Communication

Up till the end of Pelita III in the Moluccas it is recorded 79 big and small harbours connected with the communication along 3.250 miles. From 75 of the harbours concerned only 50 harbours age in the possession of pier facilities and 15 among them are in the possession of store house facilities. Besides that only in 31 harbours are appointed officials of the Directorate General of Sea Communication.

Of the 50 piers in existence only the pier of Ambon Harbour and Ternate Harbour are constructed from concrete cements. The other 48 piers are made of 17 composite piers construction (concrete pillars/iron pillars with floors made of wooden shelves), while the others 31 piers are made of wood construction, where technically the expiration of usage is relative short and needs maintenance cost every year. Besides that of the 79 harbours only the harbour of Ambon, Ternate, and Banda, have the status of enterprise condition.

The harbour of Ambon and Ternate are trunk harbours of which the function is as the collector harbour/gatherer.

Based on the Presidential Decision no 15 year 1983 the harbour of Ambon has been determined as one of the gates for tourists in the region of East Indonesia.

The location of this harbour at the Ambon bay which is the natural harbour having the safety characteristic throughout the year, and can be sailed by boats/ships with heavy weights above 10.000 tons.

At the Ambon harbour there are found some piers among others : the Yos Sudarso pier long 437 m, the Wainitu pier 40 m, the fishery pier of Galala, the Kate-kate pier, and the Laha pier. Other facilities owned by the Ambon harbour among others are : the storehouses facilities 14.565 m2,

Dari 50 buah dermaga yang ada, hanya dermaga pelabuhan Ambon, Ternate yang berkonstruksi beton, 43 buah dermaga lainnya terdiri dari 17 buah berkonstruksi Composite (tiang beton/besi, lantai papan) sedangkan sisanya 31 buah berkonstruksi kayu, dimana secara teknis umur pakainya relatif pendek dan memerlukan biaya pemeliharaan setiap tahun. Disamping itu dari 79 pelabuhan tersebut hanya pelabuhan Ambon, Ternate, dan Banda berstatus diusahakan.

Pelabuhan Ambon dan Ternate merupakan pelabuhan TRUNK yang fungsinya adalah sebagai pelabuhan kolektor/pengumpul.

Berdasarkan KEPRES No 15 Tahun 1983 Pelabuhan Ambon telah ditetapkan sebagai salah satu pintu masuk Wisatawan di Wilayah Indonesia Timur.

Letak pelabuhan ini di Teluk Ambon yang merupakan pelabuhan alam yang aman sepanjang tahun, dan dapat dimasuki oleh kapal-kapal berukuran diatas 10.000 ton.

Di pelabuhan Ambon terdapat beberapa dermaga antara lain: Dermaga Yos Sudarso panjang 437 M, Dermaga Wainitu 40 M, Dermaga Perikanan Galala, Dermaga Kate-kate dan Dermaga Laha. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki Pelabuhan Ambon antara lain: Fasilitas Gudang 14.565 m², Lapangan Penumpukan 3.410 M², Grane 15 ton 1 buah, forklif 3 ton 1 buah, forklif 1,5 ton 1 buah, Bak penampung air 270,8 M³, lampu pelabuhan 2 buah dan lain-lain.

Pelabuhan ini terletak di Pulau Ternate yang panjang dermaganya 373,8 m dengan kapasitas 10.000 ton. Disamping itu, terdapat dermaga lokal dengan panjang 40 m. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki pelabuhan Ternate antara lain: Fasilitas gudang 1.932 m², Lapangan Penumpukan 1.300 m², forklif 2 ton 1 buah, forklif 3 ton 1 buah, bak penampung air 375 m³, lampu pelabuhan 1 buah dan lain-lain.

Jumlah pelabuhan lokal/kecil di daerah Maluku tercatat sebanyak 77 buah diantaranya 48 buah sudah memiliki dermaga, yaitu 17 buah sudah ditingkatkan menjadi dermaga composit sedangkan 29 pelabuhan lainnya belum memiliki dermaga. Fasilitas-fasilitas yang telah dimiliki oleh pelabuhan-pelabuhan lokal/kecil antara lain: Luas gudang seluruhnya 4.054 m² yang tersebar pada 11 buah pelabuhan, kantor Dirjen Perla di 23 pelabuhan, rumah dinas (50 m²) di 22 pelabuhan, lampu pelabuhan di 29 buah pelabuhan dan lain-lain. Lihat Tabel III-32, III-33, dan III-34.

Sejalan dengan peningkatan pelabuhan Ambon, Ternate dan pelabuhan-pelabuhan lokal/kecil, maka dalam upaya menunjang kelancaran angkutan laut telah ditingkatkan pula fasilitas penunjang lainnya di bidang keselamatan pelayanan, seperti kesyahbandaran, Navigasi pelayaran, maupun penjagaan laut dan pantai serta bantuan SAR dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Kesyahbandaran: Dalam tahun terakhir Pelita III Kesyahbandaran Ternate telah ditingkatkan dari kelas IV menjadi kelas III. Bila pada akhir Pelita II di Maluku hanya ada 22 kesyahbandaran kelas V, 2 buah kesyahbandaran kelas IV, dan satu buah kesyahbandaran kelas II maka pada akhir Pelita III jumlah tersebut telah meningkat menjadi 26 kesyahbandaran kelas V, satu buah kesyahbandaran kelas IV, satu buah kesyahbandaran kelas II.

heaping field 3.410 m2, crane with the capacity of 15 ton is one unit, one forklift of 3 ton, 1 forklift of 1½ ton, water depot reservoir of 270,8 m3, 2 units of harbour lamps, and the like.

The harbour situation the island of Ternate has a length of pier of 373,8 m and capacity of 10.000 tons. Besides that there is also a local pier with the length of 40 m. Other facilities of Ternate harbour among others : storehouses facilities 1.932 m2, heaping fields 1.300 m2, 1 forklift of 2 ton capacity, 1 forklift of 3 ton capacity, water depot reservoir 375 m3, 1 harbour lamp, and the like.

The amount of local harbour/small harbours in the Moluccas as many as 77 harbours among others 48 ones are in the possession of piers, namely 17 piers have been accelerated into composite piers, while the other 29 harbours are not yet in the possession of piers.

Facilities that have been owned : the storehouses areal on the whole is 4.054 m2 scattered in 11 harbours, the office of the official of the Directorate of Maritime in 23 harbours, official residence 50 m2 in 22 harbours, harbour lamps in 29 harbours and otherss. See Tables III - 32, III - 33 and III - 34.

Tabel / *Table III — 32*

PERKEMBANGAN KEGIATAN PELABUHAN AMBON TAHUN 1979 - 1982
THE DEVELOPMENT OF HARBOUR ACTIVITIES IN AMBON IN 1979 — 1982

Tahun *Year*	Kapal *Boat/ship*		Barang (Ton/M³) *Goods (ton/m3)*		Penumpang (Org) *Passengers (person)*	
	Call *Call*	DWT *DWT*	Bongkar *Disembark*	Muat *Embark*	Turun *Out*	Naik *In*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1979	2.686	2.305.386	303.526	741.388	18.255	19.504
1980	2.152	2.212.802	361.956	941.212	25.004	28.966
1981	1.986	1.819.575	395.601	565.982	29.115	34.281
1982	2.081	1.994.113	433.423	596.767	40.362	41.084

Tabel / *Table III — 33*

PERKEMBANGAN KEGIATAN PELABUHAN TERNATE 1979 - 1982
DEVELOPMENT OF LOCAL HARBOUR ACTIVITIES 1979 — 1982

Tahun *Year*	Kapal/*Boats/Ships*		Barang (ton)/*Goods (ton)*		Penumpang (org) *Passengers (person)*
	Call *Call*	DWT *DWT*	Bongkar *Disembark*	Muat *Embarkment*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1979	1.323	1.129.264	88.150	359.267	9.815
1980	2.404	775.041	89.381	439.689	8.479
1981	1.191	918.791	104.705	314.594	15.538
1982	1.201	498.709	100.620	120.706	16.985

Tabel / *Table III — 34*

PERKEMBANGAN KEGIATAN PELABUHAN PELABUHAN LOKAL
1979 - 1980
DEVELOPMENT OF LOCAL HARBOUR ACTIVITIES 1979 — 1982

Tahun *Year*	Jumlah Pelabuhan *Amount of harbours*	Jumlah Kapal *Amount of boats*	DWT *DWT*	Barang/Ton M³/ *Goods (ton/m3)*		Penumpang (org) *Passengers (person)*	
				Bongkar *Disembark*	Muat *Embarkment*	Turun *Out*	Naik *In*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1980	26	8.681	2.205.086,20	66.046,53	135.101	122.019	109.994
1981	28	10.614	2.415.559,99	79.150,74	74.150,74	210.186	194.389
1982	29	13.847	3.568.206,60	75.748,9	81.813,7	236.354	215.874

Navigasi Pelayaran: Navigasi pelayaran mencakup perambuan, penerangan pantai, stasiun radio pantai, dan perbengkelan kapal. Dalam Pelita III fasilitas terus ditingkatkan, demikian pula kegiatannya. Menara suar sebanyak 3 buah dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, dan dipelihara sehingga tetap berfungsi dengan baik. Rambu suar sebanyak 10 buah, pelampung suar sebanyak 2 buah, dan lampu pelabuhan 32 buah juga terus direhabilitasi sehingga semua telah berfungsi dengan baik. Selain itu 70 tanda siang yang tersebar pada 17 alur pelayaran tetap mendapat pemeliharaan, dan jam kerja stasiun

Parallel with the enhancement of Ambon harbour, Ternate and local harbours / small harbours, in the efforts to sustain the fluency of sea transportation other sustaining facilities are also enhenced, namely in the field of maritime safety, like the port administration, maritime navigation, also the safeguarding of sea and coasts, and SAR (search and resque) aids, with the results of favourable prospects.

Port Administration : *In the last year of Pelita III the port administration of Ternate has been enhenced from class IV*

radio pantai menjelang akhir Pelita III ditingkatkan menjadi 24 jam per hari untuk mengimbangi kebutuhan yang makin meningkat.

Penjagaan Laut dan pantai: Pada awal pembentukan, sarana penunjang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai di Ambon dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Dalam Pelita III peningkatan sarana penunjang kegiatan KPLP berjalan cukup pesat sehingga pada akhir Pelita III fasilitas penunjang yang dimiliki antara lain: 1 buah kantor di Ambon, rumah dinas di Ambon dan Ternate, Gudang peralatan di Ambon, Kapal patroli 2 buah di Ambon, Speed Boat 2 buah di Ternate, Perlengkapan SAR 2 unit di Ambon, Pos KPLP di 8 Pelabuhan (Tobelo, Sanana, Kairatu, Amahai, Namlea, Tulehu, Tuai dan Dobo).

Pembinaan dan Pengembangan Armada Pelayaran

Karena lemahnya pengusaha pelayaran lokal, maka pengembangan armada lokal niaga di daerah Maluku masih terbatas pada penambahan kapal-kapal berukuran kecil yang kapasitas angkutnya maupun jangkauan pelayaran sangat terbatas dikaitkan dengan keadaan iklim di daerah Maluku.

Untuk menanggulangi kekurangan armada pelayaran lokal yang dapat melayari trayek yang panjang, maka sejak awal Pelita II (1974) telah dioperasikan armada pelayaran Perintis di daerah Maluku dengan mempergunakan 6 buah kapal berukuran 250 — 1.200 DWT atau dengan jumlah tenaga seluruhnya 3.570 DWT untuk melayari 5 trayek yang melayani/menyinggahi hampir sebagian besar ibukota Kecamatan. Kegiatan armada perintis telah ikut membantu kelancaran roda Pemerintahan, mengeluarkan wilayah-wilayah yang terpencil dari isolasi, mobilitas barang dan jasa, pengangkutan gaji dan beras pegawai dan sebagainya. Lihat Tabel III-35.

Tabel / *Table III — 35*

PERKEMBANGAN PRODUKSI ARMADA PERINTIS TAHUN 1974 - 1975 TAHUN 1983 - 1984

THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF THE PIONEERING FLEET DURING THE YEAR 1974/1975 — 1983/1984

Tahun *Year*	Jumlah penumpang *Amoun of Passengers*	Trayek (bh) *Treject (unit)*	Kapal ton/M³ *Canal (unit)*	Pelabuhan Ton/m³ *Harbour (ton/m3)*	Barang *Goods (ton/m3)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelita II					
1974/1975	5.095	5	2	37	2.330.938
1975/1976	10.881	5	3	43	3.317.146
1976/1977	10.396	5	4	48	3.221.131
1977/1978	16.041	5	5	50	6.983.648
1978/1979	16.277	5	5	47	6.135.314
Pelita III					
1979/1980	19.553	5	6	51	8.133.465
1980/1981	18.118	5	6	51	6.206.649
1981/1982	17.689	5	6	57	7.767.558
1982/1983	27.723	6	6	57	9.295.055
1983/1984	42.543	6	5	56	4.837.077

.1) Sampai dengan Oktober 1984
Till October 1984.

Arus penumpang yang memakai jasa pelayaran perintis dalam Pelita III meningkat rata-rata sebesar 12,3% per tahun, sedangkan arus barang meningkat rata-rata 4,55% per tahun. Meskipun operasi armada perintis menunjukkan perkembangan yang meningkat, namun masih harus diakui bahwa sebagian besar arus muatan dan hasil produksi belum dapat diserap seluruhnya karena jenis maupun type kapal perintis yang beroperasi di Daerah Maluku bukanlah untuk melayani muatan barang. Disamping itu jam singgah kapal-kapal perintis pada setiap pelabuhan dirasakan terlalu singkat yaitu hanya 2 sampai 3 jam.

Jasa Maritim

Alur pelayaran di Daerah Maluku cukup panjang sehingga memerlukan dok dan galangan kapal yang memadai untuk dapat melayani permintaan doking dari kapal-kapal yang beroperasi di perairan Maluku. Sampai dengan akhir Pelita III, Maluku hanya memiliki satu Perusahaan DOK dan Galangan kapal milik PT DOK dan Perkapalan Waiame yang berlokasi di Ambon. Disamping itu terdapat pula satu buah fasilitas slipway berkapasitas 200 TLG milik PN Perikani. Fasilitas milik PT DOK dan perkapalan Waiame berupa satu buah slipway berkapasitas 200 TLG, dan satu unit perbengkelan kapal dalam Pelita III mendapat rehabilitasi berat sehingga praktis kegiatannya dapat dikatakan terhenti, dan kalaupun ada kegiatannya hanya

into class III. If at the end of Pelita II in the Moluccas there is only 22. port administration of class V, 2 port administration of class IV, and one port administration of class II, then at the end of Pelita III the number concerned has been increased into 26 port administration class V, 1 port administration class IV, 1 port administration class II.

Maritime Navigation : the maritime navigation is implying the setting of sea traffic signs, coastal lightening, coastal radio stations, workshops for ships. In Pelita III the facilities are continued to be increased, similar with the activities.

Lighthouses as many as three units from year to year have been continually enhanced and maintained so that they functionate well. Lightbuoys as many as 10 units, floating lightsigns as many as 2 units, harbour lamps 32 units, which are constantly rehabilitated so that all have been functioning well. Besides that 70 signs for day times scattered in 17 sailing tracks are kept in good care, and the working hours of coastal radio stations approaching the end of Pelita III are enhanced into 24 hours a day to balance the rising demands of needs.

The Safeguarding of beach and coast : In the beginning of the establishment the sustaining means of the units for safequarding the sea and coast in Ambon, it can be said, is not present at all.

In Pelita III the enhancement of sustaining means of the activities by the KPLP - units of safeguarding the sea and coast, is running quite well, so that at the end of Pelita III the sustaining facilities possessed among others 1 office building in Ambon, official residence in Ambon and Ternate, equippent storehouse in Ambon, 2 patrol boats in Ambon, 2 speed boats in Ternate, SAR equipment 2 units in Ambon, PKLP posts in 8 harbours (Tobelo, Sanana, Kairatu, Amahai, Namlea, Tulehu, tual, and Dobo).

Promotion, and Development of Maritime Fleet

Due to the weakness of the local maritime sailing enterprise, therefore the development of the local maritime commercial fleet in the Moluccas, is still limited to the increase of small size boats with carrying capacity and its distance capacity is restricted related to the climate situation in the Moluccas.

To overcome the lack of commercial local fleet that can sail the long distance trajects, since the beginning of Pelita II (1974) there have been in the operational activities a fleet of pioneering navigation in the Moluccas by using 6 boats / ships with the heavy weight of 250 - 1200 DWT or with the total capacity 3.570 DWT to sail 5 trajects which call at nearly all capitals of the sub-districts. The activities of the pioneering fleet has taken share in the supporting of fluent public administration, to eliminate the remote areas from the isolation, the goods and service mobilities, transportation of salaries and rice ransom for the government officials, etc. See Table III - 35.

The flow of passengers utilizing the service of pioneering maritime in Pelita III increases on the average of 12,3% per year, while the flow of goods increases on the average of 4,55% per year. Although the operational activities of the pioneering fleet show improvement, but it should be acknowledged that most part of the flow of carriage and products have not yet been able to be absorbed enticely because the classification and type of pioneering boats operational in the waters of Moluccas are not destined to serve goods carriage. Except that the hours of calling at a harbour of the pioneering boats is felt too short, namely only 2 till 3 hours.

The Service of Pioneering Boats

The sailing track in the Moluccas waters is long enough so that it needs dry docks and ship wharfs which are adequate to be able to serve the demands of docking of the ships operating in the waters of Moluccas. Up till the end of Pelita III, the Moluccas has only 1 dock year and ship wharf owned by PT DOCK dan PERKAPALAN WAIAMI located in Ambon. Besides that there is also one facility of slipway with the capacity of 200 TLG owned by the PN PERIKANI. The facilities of the PT Dock dan Perkapalan Waiami are consisting of 1 slipway with the capacity of 200 TLG and one unit of shipping workshop. In Pelita III it has undergone a heavy rehabilitation so that practically all its activities can be said suspended and if there is any activity only limited to small repairing activities. Except that one facility of floating dock owned by PT Dock dan Perkapalan Waiami with the capacity of 2000 TLG since 1979 has been moved away to Surabaya. Doing so during the last three years Pelita III the docking facilities that functionate are only the slipway owned by the Perum Perikani at Galala, so that by the limitation of docking facilities all the boats operational in the province of Moluccas, most of them are compelled to dock outside the region.

b. Air Communication

At the end of Pelita III the Moluccas is in the possessif of 18 airfields, two of them (Ambon and Ternate) are functioning for the communication

terbatas pada reperasi kecil. Selain itu satu fasilitas DOK Apung milik PT DOK dan Perkapalan Waiame berkapasitas 2.000 TLG sejak tahun 1979 sudah dipindahkan ke Surabaya. Dengan demikian selama 3 tahun terakhir Pelita III fasilitas doking yang berfungsi hanya Slipway milik Perum Perikani di Galala, sehingga dengan terbatasnya fasilitas doking maka kapal-kapal yang beroperasi di daerah Maluku sebagian besar terpaksa harus doking di luar daerah.

c. Perhubungan Udara

Pada akhir Pelita III Maluku telah mempunyai 18 buah lapangan terbang, 2 buah diantaranya (Ambon dan Ternate) merupakan pelabuhan udara yang berfungsi untuk hubungan ke luar daerah; 9 buah (Amahai, Tual, Namlea, Galala, Kao, Sanana, Labuha, Saumlaki dan Banda) dipergunakan untuk penerbangan perintis lokal; 5 buah (Gebe, Benjina, Bula, Falabisahaya dan Bobong) dipergunakan oleh perusahaan swasta; 1 buah milik AURI (Daruba) yang juga dipergunakan untuk melayani penerbangan perintis, sedangkan 1 buah lapangan perintis (Dobo) sedang dalam tahap penyelesaian.

Lapangan terbang Falabisahaya kemudian juga digunakan sebagai lapangan terbang perintis. Selain Ambon, Ternate, Daruba, Tual dan lapangan terbang milik swasta, maka lapangan-lapangan terbang yang lain, dibangun dengan biaya APBD, dengan ukuran landasan rata-rata 700 M × 30 M. Dilihat dari kemampuan landasan, lapangan terbang perintis dan swasta baru dapat didarati oleh pesawat jenis Casa 212 dan Twin Otter. Sampai dengan akhir Pelita III, lapangan terbang perintis yang telah ditingkatkan untuk melayani jenis pesawat F 27 dan HS adalah Ternate dan Tual. Dalam Pelita III, realiasi angkutan udara melalui pelabuhan udara Pattimura Ambon meningkat rata-rata dengan 13,58% per tahun untuk angkutan penumpang, dan rata-rata 12,18% per tahun untuk angkutan barang.

Khusus mengenai arus lalu lintas angkutan udara dengan pelabuhan asal dan tujuan lapangan terbang perintis, dalam 2 tahun terakhir Pelita III, menunjukkan angka yang menurun rata-rata 18,2% per tahun untuk angkutan penumpang, dan rata-rata 19% per tahun untuk angkutan barang. Sesuai KEPRES No 15 Tahun 1983, maka pelabuhan udara Pattimura telah ditetapkan sebagai salah satu pintu masuk bagi wisatawan asing untuk penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal diantara 3 pelabuhan udara yang ditetapkan di wilayah Indonesia bagian Timur.

Masalah-masalah yang masih dihadapi dalam bidang perhubungan udara adalah sebagai berikut:

a. Kondisi fisik maupun pelayanan jasa dan keselamatan penerbangan di pelabuhan udara Pattimura yang masih perlu ditingkatkan terutama untuk persiapan pelaksanaan KEPRES No 15 Tahun 1983.
b. Persiapan lapangan terbang perintis dan lokal, dalam menunjang fungsi pelabuhan udara Pattimura dalam segi fisik, pelayanan umum, dan keselamatan penerbangannya, maupun sebagai lapangan terbang perintis yang memehuni syarat.
c. Belum terbentuknya satuan-satuan penanggulangan darurat di lapangan terbang perintis di Maluku.
d. Frekuensi angkutan perintis udara yang masih terbatas dan menurun, dibandingkan dengan pertengahan masa Pelita III, terutama dalam kaitan dengan fungsinya sebagai angkutan udara perintis.
e. Belum terealisirnya pembangunan lapangan terbang perintis di daerah terpencil seperti di kecamatan PP. terselatan, Kabupaten Maluku Tenggara, terutama dalam fungsinya untuk membuka isolasi wilayah tersebut.

5. Pos dan Telekomunikasi

Dalam Pelita III telah dibangun 12 Kantor Pos Pembantu dan 1 buah Kantor Pos. Dengan demikian sampai akhir Pelita III terdapat 2 Kantor Pos dan 33 Kantor Pos Pembantu yaitu 2 Kantor Pos di Ambon dan Ternate, 3 Kantor Pos Pembantu di ibukota Kabupaten (Soa—Siu, Masohi dan Tual), 7 Kantor Pos Pembantu di 7 Kecamatan di Maluku Utara (Daruba, Tabelo, Jailolo, Labuha, Sanana, Laiwui dan Dofa), 13 Kantor Pos Pembantu di 12 kecamatan di Maluku Tengah (Namlea, Leksula, Piru, Kairatu, Tulehu, Saparua, Amahai, Geser, Neira, Tehoru, Pelau dan Mako), 1 Kantor Pos Pembantu di kecamatan Halmahera Tengah (Weda), 7 Kantor Pos Pembantu di 7 kecamatan Maluku Tenggara (Elat, Dobo, Larat, Saumlaki, Tepa, Wonreli dan Serwaru) dan 2 Kantor Pos Pembantu di kecamatan di Kotamadya Ambon (Galala dan Passo). Selain itu, sampai dengan akhir Pelita III, di wilayah Maluku terdapat 46 bis surat untuk pelayanan jasa pos, dan pos keliling sebanyak 2 buah.

Produksi jasa pos dan giro selama Pelita III telah meningkat rata-rata per tahun yaitu: surat kirim 16,2%, surat terima 19,7%, paket pos

with outside world; 9 airfields (Amahai, Tual, Namlea, Galala, Kao, Sanana, Labuha, Saumlaki, and Banda) are used for the local pioneering aviation; 5 airfields (Gebe, Benjina, Bula, Falabısahaya, and Bobong) are used by the private enterprises; one airfield is used by the AURI (Indonesian Air Force) namely at Daruba, which is also used to serve the pioneering aviation, while one pioneering airfield (Dobo) is in the making.

The airfield of Filabisahaya is also used as the pioneering aviation. Except Ambon, Ternate, Daruba, Tual and the airfields owned by the private enterprises, the other airfields are constructed on the expenses of the regional revenues and budget (APBD) with the base measurement the average of 700 m x 30 m. From the point of view of the capacity of the airbase, the pioneering airfields and private enterprises are just being able to be landed by aircrafts of the types of Cassa 212 and Twin Otter. Up till the end of Pelita III the pioneering airfields that have been enhanced to serve the types of aircrafts of F 27 and HS are Ternate and Tual. In Pelita III, the realization of air transportation via the airport of Patimura - Ambon increases on the average of 13,58 % per year for the passengers transportation, and the average of 12,18% per year for the goods transportation.

In particular concerning the flow of air traffic of transportation with the airports of departure and destination of pioneering airfields, in the last two years of Pelita III, shows a declining number on the average of 18,2% per year for the passenger transportation, and the average of 19% per year for the goods transportation. Commensurating with the President Decision no 15 year 1983, the airport of Patimura has been determined as one of the gate for foreign tourists for the aviation of regular schedule and non-regular flights among three airports which are decided uponin the eastern part of Indonesia.

The problems being still faced in the air communication are as follows :

a. The physical condition and service operation and flight safety at the airport of Patimura are still to be enhanced especially for the preparation of the realizati n of President Decision no 15 year 1983.
b. The preparation of pioneering airfields and local airfields in sustaining the function of Patimura Airport in physical aspect and general service, and its flight safety, and as the pioneering airfield fulfilling the prerequisites.
c. Not yet available of units for overcoming cases of emergency in the pioneering airfields in the Moluccas.
d. The frequency of the pioneering aviation that is still limited and declining compared to the middle of the period of Pelita III in particular in relation with its function as the pioneering transport aviation.
e. The construction of airfields on pioneering aviation that are not yet realized fully in the remote places like in the subdistrict of the southern islands, the district of Southeast Moluccas, especially in its function to open the isolation of the areas concerned.

5. Post and Telecommunication

In Pelita III there have been built 12 auxiliary post offices and 1 post office. Doing so, to the end of Pelita III there are 2 post offices and 33 auxiliary postoffices namely 2 postoffices in Ambon and Ternate, 3 auxiliary postoffices in the district capitals (Soasiu, Masohi, and Tual), 7 auxiliary postoffices in 7 subdistricts in North Moluccas (Daruba, Tobelo, Jailolo, Labuha, Sanan, Laiwui, and Tufa), 13 auxiliary postoffices in 12 sub-districts in the Central Moluccas (Namlea, Leksula, Piru, Kairatu, Tulehu, Saparua, amahai, Geser, Neira, Toheru, Pelau, and Mako), one auxiliary post office in the subdistrict of Central Halmahera, (Weda), 7 puxiliary post offices in 7 sub-districts in Southeast Moluccas (Elat, Dobo, Larat, Saumlaki, Tepa, Wonreli, and Seruaru), and 2 auxiliary post office in the sub-districts of Ambon municipality (Galala and Paso). Except that up till the end of Pelita III, in the region of Moluccas, there are 46 letter boxes for the post service. and 2 mobile post offices. The products of post and giro service during Pelita III have increased with the average per year, namely : sending letters 16,2%, letters received 19,7%, packages sent 11,4%, received packages 3,7%, money order sent 16,6% (financial), 1,9% (activities), money order received 7,8% (financial), 0,9% (activities), giro and checkpost 2,7% (financial), 1,5% (activities), tabanas savings 8,1% (financial), 0,8% (activities). Tabanas received 11 % (financial), 2,7% (activities), post materials selling 26,1 %, television tax 54,7%.

The development in the field of telecommunication in Pelita III in the Moluccas has been succeeded to extensify the network and increase the service of telephones, telex, cable transmission, and service on radio telephonic communication to all parts of the Moluccas.

In Pelita III, the results gained among others are the supply of telephone service interlocally in 15 radio stations among 23 radio stations, which beforehands are only supplying cable service, namely located in the district of North Moluccas 2 stations (Tobelo and Sanana), the administration of Central Halmahera 1 station (Soasiu), the district of Central Moluccas 6 stations (Namlea, Amahai, Geser, Banda, Saparua, Leksula), the district

kirim 11,4%, paket pos terima 3,7%, wesel pos kirim 16,6% (keuangan), 1,9% (kegiatan), wesel pos terima 7,8% (keuangan), 0,9% (kegiatan), giro dan cek pos 2,7% (keuangan), 1,5% (kegiatan), Tabanas tabungan 8,1% (keuangan), 0,8% (kegiatan). Tabanas terima 11% (keuangan), 2,7% (kegiatan), Penjualan benda Pos 26,1%, iuran televisi 54,7%.

Pembangunan bidang Telekomunikasi dalam Pelita III di Maluku telah berhasil memperluas jaringan dan meningkatkan jasa pelayanan telepon, telex, telegraph transmisi maupun pelayanan Radio Telepon Daerah ke seluruh Daerah Maluku.

Dalam Pelita III, hasil yang telah dicapai antara lain adalah penyediaan jasa telepon antar wilayah di 15 stasiun radio diantara 23 buah stasiun radio yang sebelumnya hanya menyediakan jasa telegrap, yaitu yang berlokasi di Kabupaten Maluku Utara 2 buah (Tobelo, Sanana) Daerah administratif Halmahera Tengah 1 buah (Soa—Siu) Kabupaten Maluku Tengah 6 buah (Namlea, Amahai, Geser, Banda, Saparua dan Leksula), Kabupaten Maluku Tenggara 6 buah (Tepa, Dobo, Larat, Elat, Saumlaki, dan Wonreli).

Disamping itu selama Pelita III telah dicapai pula hasil pembangunan sentral telepon otomat di Ternate dengan kapasitas 1.000 line unit yang dioperasikan sejak Maret 1981 yang kemudian masuk jaringan pelayanan SLJJ, dan perluasan sentral otomat Ambon dari 1.600 line unit menjadi 3.600 line unit.

Peningkatan prasarana/sarana bidang telekomunikasi ini telah meningkatkan pula produksi jasa telepon dalam negeri (pulsa DN) rata-rata ± 29,7% per tahun, sedangkan percakapan internasional meningkat rata-rata 12,39% per tahun.

Dengan bertambahnya kapasitas sentral telepon otomat kemudahan yang didapat melalui fasilitas SLJJ, jumlah percakapan interlokal (non otomat) cenderungan menurun rata-rata 26,8% per tahun, sedang lama percakapan interlokal menurun ± 5,4% per tahun.

Percakapan internasional meningkat rata-rata 3,8% dan lama percakapan meningkat rata-rata 10,8%, meskipun demikian jumlah banyaknya percakapan memenuhi jumlah permintaan, disebabkan karena berbagai hal teknis. Sistem telepon manual digunakan di 18 lokasi yaitu Masohi (250 ss), Passo (200 ss), Tual (400 ss), Soa—Siu (100 ss), Namlea (100 ss), Tobelo (100 ss), Saumlaki (50 ss), dan Sanana (50 ss).

Telepon umum di seluruh Maluku sampai dengan akhir Pelita III berjumlah 30 buah masing-masing 10 buah di Ambon, 5 buah di Ternate. Sedangkan yang dilaksanakan di Ambon juga berjumlah 10 ss dan Ternate 5 ss.

Sampai dengan akhir Pelita III terdapat 23 buah stasiun radio yang melayani jasa telegraph yaitu di Kabupaten Maluku Utara 6 buah (Morotai, Tobelo, Jailolo, Labuha, Sanana dan Laiwui). Daerah administratif Halmahera Tengah 2 buah (Weda dan Soa-Siu); Kabupaten Maluku Tengah 8 buah (Namlea, Leksula, Piru, Amahai, Wahai, Geser, Banda dan Saparua); Kabupaten Maluku Tenggara 7 buah (Tual, Dobo, Elat, Larat, Saumlaki, Tepa dan Wonreli).

Jasa pelayanan telegram dalam negeri meningkat dengan 1,44% setahun, dengan peningkatan jumlah kata rata-rata 2,36% per tahun sedangkan telegram luar negeri menurun jumlahnya dengan rata-rata 33,3% setahun dengan jumlah kata rata-rata 36,2% setahun, yang disebabkan karena meningkatnya rata-rata pelayanan jasa telex.

Jumlah sambungan telex pada akhir Pelita III berkapasitas 100 ss, dimana 95 ss telah tersambung. Di bidang transmisi, dalam masa Pelita III telah dibangun 7 Stasiun Bumi Kecil yang telah berfungsi yaitu di Tobelo, Sanana, Soa—Siu, Masohi, Namlea, Saumlaki dan Tual.

Karena jangkauan 23 stasiun radio yang terbatas, maka sejak tahun 1968 telah dibangun jaringan radio telepon daerah (RATELDA) pada semua ibukota kecamatan. Hingga kini stasiun RATELDA di Maluku berjumlah 54 buah yang tersebar di 54 kota kecamatan, dimana biaya operasional sepenuhnya ditangani dari dana APBD Dati I Maluku. Berdasarkan PERDA No 7 Tahun 1980 telah ditetapkan ketentuan tarif penggunaan jasa RATELDA oleh masyarakat.

Volume penyampaian berita melalui RATELDA, meningkat ± 6,45% per tahun untuk berita dan ± 2,02% per tahun untuk berita keluar. Penggunaan peralatan elektronika yang memakai frekuensi radio saat ini meningkat jumlahnya, yang kini memerlukan peningkatan pengawasan yang baik. Dengan demikian kapasitas telekomunikasi yang ada hingga tahun 1983/1984 adalah sebagai: Kapasitas STO 4.600 ss, kapasitas STM 1.250 ss, kantor daerah telegraph 2 buah, kantor cabang telegraph 23 buah, kapasitas telex dalam negeri 100 ss, SBK 7 buah, fasilitas SLJJ di Ambon 3.600 line unit dan fasilitas SLJJ di Ternate 1.000 line unit.

6. Pariwisata

Kepulauan Maluku mempunyai suatu keunikan letak bila ditinjau dari segi antropologi yakni antara rumpun bangsa Austronesia dan Polinesia/Micronesia. Sementara itu ia berada pula di persimpangan

of Southeast Moluccas 6 stations (Tepa, Dobo, Larat, Elat, Saumlaki, and Wonreli).

Besides that during Pelita III there has been achieved the establisment of the automatic telephone centre in Ternate with the capacity of 1000 lines unit operating since March 1981, which then joins the SLJJ service network, and the extensification of telephone automatic centre of ambon from 1600 lines unit into 3600 lines unit.

The enhancement of infrastructure/means on telecommunication have enhanced the service products of domestic telephone service (domestic pulsa) on the average of 29,7% per year, while the international service increases the average of 12,39% per year.

By the increase of the capacity of the central automatic telephone the facilities available through the service of SLJJ (Long distance service), the amount of long distance service (non-automatic) has the tendency of declining on the average of 26,8% per year, while the duration of long distance communication decreases about 5,4% per year.

The International communication increases on the average of 3,8% and the duration of the communication increases on the average of 10,8 %, nevertheless the amount of communication fulfill the amount of demands, due to several tecnical reasons. The manual telephone system is still used in 18 locations, namely Masohi (250 ss), Paso (200 ss), Tual (400 ss), Soasiu (100 ss), namlea (100 ss), Tobelo (100 ss), Saumlaki (50 ss), Sanana (50 ss).

The general telephone in the whole Moluccas till the end of Pelita III is totally 30 units, each consists of 10 units in Ambon, 5 units in Ternate, while carried out in Ambon are also 10 ss and in Ternate 5 ss.

Up till the end of Pelita III there are found 23 radio stations serving the cable service, namely in the district of North Moluccas 6 stations (Morotai, Tobelo, Jailolo, Labuha, Sanan, and Laiwui). The administrative Central Halmahera 2 stations (Weda, Soasiu); the district of Central Moluccas 8 stations (Namlea, Leksula, Piru, Amahai, Wahai, Geser, Banda, Saparua); the district of Southeast Moluccas 7 stations (Tual, Dobo, Elat, Larat, Saumlaki, Tepa, and Wonreli).

The domestic cable service increases 1,44 % per year, while the enhancement in the amount of words has the average of 2,36 % per year, while international cables decreases with the average amount of 33,3 % per year with the total words of average 36,2 % per year, caused by the increase of telex service.

The amount of telex connection at the end of Pelita III with the capacity of 100 ss, of which 95 ss have been connected. In the field of transmission, in the period of Pelita III there have been built 7 mini satelite stations, of whem already funotioning are in Tobelo, Sanan, Soasiu, Masohi, Namlea, Saumlaki, and tual.

Because of the limited reach of the 23 radio stations, therefore since the year 1968 there have been built a network of regional radio-telephonic communication (Ratelda) in every capital of sub-districts. Up till the present the station of regional radio-telephonic communication in Moluccas are totally numbered 54 units scattered in 54 capitals of sub-districts, where the operational costs are fully spent from the regional revenues and budget fund of the province of Moluccas. Based on the Regional Regulation no 7 year 1980 it has been decided on the tariff of the ratelda service by the society.

The volume of news deliverance through the radio telephonic communication increases about 6,45% per year for the incoming news and about 2,02 % for the outsending news. the use of electronic equipment using the radio frequency at this moment is increasing in the amount, which now needs acceleration of good supervision. Doing so, the existing telecommunication capacity till the year 1983/1984 are as follows : capacity of the automatic telephonic centre is 4.600 ss, the capacity of manual telephone centre 1.250 ss, 2 cable regional offices, 23 branches of cable offices, capacity of domestic telex 100 ss, and SBK 7 units, facilities of long distance telecommunication (SLJJ) in Ambon 3600 lines unit, and facilities of long distance telecommunication in Ternate 100 lines unit.

6. Tourism

The Moluccas has a unique locality if viewed from the anthropological aspect, namely between the Austronesian race and the Polynesian/Micronesian race. In the other hand it is also located between two current of earth dynamics of the crossection of Mediterania and Circumpacific.

The uniqness of this location of the Moluccas creates a special characteristic of fauna and flora which are seldom found in other part of the world. For example the sea gardens, the coral reef islands, and volcanic islands with white sands, ornament fishes of many varieties, many kinds of snails and sea shells and oysters, sea lilia and hebras, cloves and nutmegs that have a world historical background, the sago palm and meranti, the larat orchid and cajput oil, birds of paradise and block cackatoes, mini kangaroes having unique stature and movement, and many kinds of animals and sea plants and land

dua arus gaya bumi, yakni arus gaya bumi Mediterania dan Circum Pasifik.

Keunikan letak kepulauan Maluku ini telah melahirkan ciri-ciri khas alam fauna dan flora tersendiri yang jarang diketemukan di daerah/negara lain. Seperti taman laut, pulau-pulau coral **dan fulkanis yang berpasir** putih, ikan-ikan hias yang **beraneka ragam, berjenis-jenis** siput dan kerang laut, lilia dan hebras laut, cengkeh **dan pala yang telah membuat sejarah dunia,** pohon **sagu dan meranti, anggrek larat dan kayu putih,** cenderawasih dan **kakatua hitam, kangguru mini yang sangat unik bentuk dan gayanya serta berjenis-jenis binatang dan tumbuhan laut/darat yang karakteristik. Disamping itu manusia Maluku dibentuk oleh faktor alam, letak geografis dan historis sehingga lahirlah** ciri-ciri khas rakyat Maluku seperti hati terbuka, **spontan, ramah-tamah, bergotong-royong secara kekeluargaan atas dasar Hukum Pela.**

Tanaman perdagangan utama sebagai tradisional komoditi adalah cengkeh, pala, serta kelapa yang telah membuat sejarah dunia dimana **buktinya dapat** terlihat dalam bentuk **peninggalan-peninggalan sejarah antara lain: Benteng-benteng, gereja-gereja, mesjid-mesjid, tari-tarian dan lain-lain.** Oleh karena daerah Maluku **terdiri dari 90% lautan, maka sebahagian besar tata kehidupan rakyat Maluku berorientasi ke Maritim. Hal tersebut** dapat terlihat **dengan jelas pada tarian, kerajinan tangan,** syair, lagu dan lain-lain. **Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sudah sejak dulu Maluku merupakan daerah yang** mempunyai daya tarik yang tinggi bagi **orang-orang asing serta kegiatan** hubungan antar wilayah.

Adapun obyek-obyek wisata baik alam maupun **sejarah Budaya** tersebar hampir di seluruh daerah maluku, seperti:

a. **Ambon dan sekitarnya:** Di daerah ini terdapat Atraksi Sejarah Budaya seperti misalnya; Museum Siwa Lima, Tugu Pattimura, Tugu Martha Tiahahu, Kuburan Australia, Tugura Dolan, Benteng Victoria, Gereja dan Mesjid tua di Hila/Kaitu, tari cakalele, Saurekareka, tari lenso, tari bambu gila, orkes suling dan kulit bia, kerajinan tangan tradisional dan lain-lain.

   Wisata yang bersifat atraksi a.l. : Teluk Ambon, Teluk Baguala, Pantai Natsepa, Hunimua, Batu Capeo, Namalatu, Waiame, Toisapu, Marthafons, Pulau Pombo, Taman Laut Eri, Taman laut Amahusu, taman Laut Namalatu, Taman Laut Pulau Kasa, Taman Laut Hative, Sumber air panas, kebun cengkeh dan pala, dusun wisata, kolam Waai, Tempayang Soya dan lain-lain.

   Atraksi Buatan Manusia yang cukup baik di Maluku a.l.: Taman Ria Remaja, Bioskop Amboina, Bioskop Olimpic, Bioskop Arumbai, Bioskop Kartika Beta, Bioskop Victoria, Bioskop Bima, Night Club, Santai dan lain-lain.

b. **Ternate dan sekitarnya:** Atraksi sejarah budaya yang terdapat di wilayah ini a.l.: Benteng Oranye, Toloko, Gamalama, Santo Perdo, Kayu Merah, Kedaton Sultan Ternate, Sultan Jailolo, Sultan Bacan, Peninggalan Perang Dunia II tari-tarian tradisional, upacara-upacara adat tradisional kerajinan tangan dan lain-lain.

   Atraksi alam yang penting ialah cengkeh AFO (± 350 tahun umurnya), gunung Gamalama, Mamuja, Danau Laguna, Tolire, Durma, Pantai Bastion, Ngade, Sulamadaha, Batu Angus, Castella, Sumber air panas. taman laut dan lain-lain.

c. **Seram dan sekitarnya:** Atraksi sejarah budaya; Benteng Belgica, Duurstede, New Horn, Patung Raja Willem III, Peninggalan sejarah di Banda, Upacara-upacara tradisional, tarian, dan kerajinan tangan tradisional dan lain-lain.

   Atraksi Alam a.l.: Taman-taman laut, Pantai yang indah, air terjun, sumber air panas, Gua-gua, Gunung dan bukit, hutan suaka, kawasan burung dan lain-lain.

d. **Tual dan sekitarnya:** Atraksi sejarah budaya; kerajinan menenun, mengukir, Upacara cuci Baileu, tari-tarian tradisional, barang antik, peninggalan Perang Dunia ke II dan lain-lain.

   Atraksi alam: Taman laut, pantai yang indah permai, Anggrek Larat, pembibitan mutiara, burung cenderawasih, gua-gua, air terjun, sumber air panas dan lain-lain.

Melihat potensi yang ada dan kemungkinan pembangunan sub sektor Pariwisata, maka pada awal Pelita III telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 556—71/04/1981 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Dati I Maluku.

Dalam bidang perencanaan dan pengembangan, pra survey ke pariwisataan Daerah Maluku telah dibuat pada tahun 1978 yang membagi daerah Maluku menjadi 3 wilayah pengembangan pariwisata, yaitu Ambon dan Maluku Tengah, Maluku Utara dan Halmahera Tengah serta Maluku Tenggara.

plants of unique characteristics. Besides that the people of Moluccas are formed by the natural factors, the geographical and historical location, so that a special characteristic of the Moluccan people is born, such as open heartedness, spontanity, kindpheanted, mutual assistance within the family spirit obased on the pela law.

The main commercial plant as the traditional commodity is the cloves, nutmeg, and coconut that have made a world history, where the evidence can be seenin the form of historical remains among others : ancient fortress, churches, mosques, dances etc. Because of the region of the Moluccas is consisting of 90 % sea water, therefore the largest part of the way of living of the people is maritime oriented. The fact can be seen clearly in the dancess, handicrafts, poems, songs and the like. Thus, it can be said that since the ancient time the Moluccas has been a region in the possession of great allureness for foreigners and the activities on inter-insular communication.

The tourism objects either natural or historical background are scattered nearly all over the whole region of the Moluccas, like :

a. Ambon and The Surroundings : in this area there is found the historical and cultural attractions such as : the musseum of Siwa Lima, the Patimura Monument, the Marta Tiahahu Monument, the australian cemetry, the Dolan Monument, the Victoria Fortres, the ancient Church and Mosque at Hila / Kaitetu, the cakalele dance, saureka-reka, the lenso (handkerchief) dance, the bamboo gila dance, the seruling orchestra and shell orchestra, traditional handicrafts, etc.

Tourism of natural attraction characteristic among others : the island of Ambon, the Bay of Baguala, the Natsepa Beach, Hunimua, Batucapeo, Namalatu, Waaimi, Toisapu, Martafons, the island of Pombo, the sea garden of Eri, the sea garden of Amahusu, the sea garden of Namalatu, the sea garden of the island of Kasa, the sea garden of Hative, the hot spring, cloves and nutmeg plantations, tourism villages, the pound of Waai, Tempayang Soya, etc.

The artificial attraction made by human hands in the Moluccas among others : the Taman Ria Remaja (Youth Garden), the Amboina cinema, the Olympic cinema, the Arumbai cinema, the Kartika Beta cinema, the Victoria cinema, the Bima cinema, night club, other leisure places.

b. Ternate and Surroundings : attractions on historical and cultural aspects in this region are among others : the Oranye Fortres, Toloko, Gamalama, Santo Perdo, Kayumerah, Kedaton of the Sultan of Ternate, the sultan of Jailolo, the sultan of Bacan, the remains of the second world war, the traditional dances, traditional customary ceremonies, handicrafts and the like.

the main natural attraction are : the AVO cloves (about 350 years of age), the Gamalama mountain, Mamuju mountain, Laguna lake, Tolire, Dunma, the Bastion beach, Ngade, Sulamadeh, Batuangus, Kastella, hot spring, sea gardens etc.

c. Seram and Surroundings : The historical and cultural attractions : the Belgika Fortres, Duurstede, New Horn, the monument of King William III, the remains of history in the Banda islands, traditional ceremonies, dances, traditional handicrafts, etc.

Natural attractions among others : sea gardens, beautiful beaches, waterfalls, hot springs, caves, mountains and hills, preservation forest, birds colony, etc.

d. Tual and The Surroundings :

The historical and cultural attractions : the waving industry, woodcarving, washing ceremony of Baileu, the traditional dance, antiquities, remains of second world war, etc.

Looking at the existing potentialities an the posibility of the development of sub-sector on tourism at the beginning of Pelita III the government has issued a regulation no 24 year 1979 on a part of tourism administration being handed over to the authority of the province of Moluccas.

As the follow up the provincial authority has implemented the regional regulation no 556-71/04/1981 on the formation, organisattional structure, and working system of tourism service in the Moluccas.

In the fields of designing and development, the presurvey on tourism in the Moluccas has been done inthe year 1978 which devide the Molucan region into three area of tourism development, namely Ambon and the central Moluccas, North Moluccas and Central Halmahera, and Southeast Moluccas.

In the year 1981 has been made the detailed design from five tourism resorts namely the resort of Hanimua beach, Namalatu beach on the island of Ambon, and the beach resort of Sulamadaha, the beach of Gambesi, and Batuangus on the island of Ternate. Then the study on the main tourism planning for Southeast Moluccas has been composed in 1982 and the main design of maritime tourism of Moluccas in the year 1983. In parcitular for

Pada tahun 1981 telah dibuat detailed design dari lima resort pariwisata yakni resort pantai Halmahera, pantai Namalatu di pulau Ambon serta resort pantai Sulamadaha, pantai Gambesi, dan Batu Angus di pulau Ternate. Kemudian study Rencana Induk Wisata Maluku Tenggara dibuat pada tahun 1982 dan Rencana Induk Wisata Bahari Maluku pada tahun 1983. Khusus untuk Wisata Bahari Pemerintah telah menetapkan Daerah Maluku sebagai salah satu prioritas pengembangan Wisata Bahari Indonesia dari 5 (lima) daerah yang ditetapkan yaitu Riau, Jakarta, Maluku, Bali dan Sulawesi Utara.

Dalam bidang pemasaran wisata, terlihat perkembangan kunjungan wisata asing ke Ambon selama Pelita III meningkat rata-rata dengan 27,4% setahun dengan rata-rata lama tinggal 6 (enam) hari serta rata-rata pengeluaran $ 65 per hari. Lihat Tabel III-36.

Tabel / *Table III — 36*

PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISATAWAN ASING LANGSUNG KE AMBON SELAMA PELITA III
THE DEVELOPMENT OF TOURIST VISITORS DIRECTLY TO AMBON DURING PELITA III

(Dalam US $) / *In US $*

Tahun / *Year*	Jumlah Kunjungan (orang) / *Amount of Visitors (person)*	Rata-rata Lama Tinggal (Hari) / *Average stay duration (days)*	Rata-rata Pengeluaran per hari / *Average expenses per day*	Jumlah Pengeluaran/ Devisa / *Total expenses Foreign change*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1978	1.573	5	60	471.900
1979	1.868	6	60	672.480
1980	1.923	6	60	692.280
1981	2.367	6	60	852.120
1982	1.566	7	75	822.150
1983	5.277	7	75	2.770.425
s/d Nop/*up till November*				

Wisatawan asing yang mengunjungi Ambon pada tahun 1983 sebesar 336%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Ambon telah dibuka sebagai pintu masuk utama (Gate Way) di Indonesia Timur sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 1983, dimana banyak wisatawan dari Australia dan Jepang berkunjung ke Ambon.

Kegiatan promosi kepariwisataan selama Pelita III terus meningkat. Partisipasi Daerah Maluku dalam Events Wisata Internasional selama Pelita III adalah sebanyak 4 (empat) kali. Lihat Tabel III-37 dan III-38.

Meningkatnya pertumbuhan industri Jasa Pariwisata, maka meningkat pula pertumbuhan tenaga kerja pada bidang ini selama Pelita III mengalami pertumbuhan rata-rata 17,3%. Pada tahun 1979 jumlah tenaga kerja di bidang kepariwisataan (hotel, biro perjalanan, restoran dan serta souvenir shop) berjumlah 1.040. Tahun 1983 jumlah tersebut sudah mencapai sebanyak 1.220 orang.

the maritime tourism the government has decided the Moluccas region as one of the development priority on the Indonesian maritime tourism of five regions confirmed by the government, namely Riau, Jakarta, Moluccas, Bali, and North Sulawesi.

In the field of tourism marketing there is an increase of foreign tourists to Ambon during Pelita III on the average of 27,4% per year with the average stay of 6 days and average of expeses in US $65 per day. See Table III – 36.

The foreign tourists visiting Ambon in the year 1983 as many as 336% increases if compared to the previous years. This fact is caused by the opening of Ambon as the firect main gate way in the eastern Indonesian part in accord with the President's Decree no 15 year 1983, so that many tourists from Australia and Japan visit Ambon.

The activities on the tourism promotion during Pelita III is constantly increasing. The participation of Moluccas region in the international touritsm events during Pelita III is as muach as 4 times.

See Tables III – 37 and III – 38

Tabel /*Table III — 37*

PARTISIPASI DAERAH MALUKU DALAM EVENTS WISATA INTERNATIONAL SELAMA PELITA III
PARTICIPATION OF MOLUCCAS IN THE INTERNATIONAL TOURISM EVENTS DURING PELITA III

No	Peristiwa Wisata / *Tourisme Events*	Negara / *Country*	Tahun, / *Year*
(1)	(2)		
1.	Salondes Vocances	Swiss/*Switzerland*	1979
2.	Kesenian Siwa Lima	Papua Nugini	1979
3.	ITB Berlin	Berlin/West Germany	1982
4.	Kesenian Siwa Lima II	Nederland/Netherlands	1982

The increase of growth on tourism service industri makes an increase in the growth of manpower in this field, during the third Pelita has undergone an increase of average 17,3%. In the year 1979 the amount of manpower in the tourism world (hotel, travel bureaus, restaurants and bars, and souvenir shops. are 1040 persons. In the year 1983 the number mentioned has already reached the sum of 1.220 pesons.

IN the matter of development, the allocation of funds for tourism during Pelita III is Rp543.455.000, of which the source is the regional revenues and budget of the province of Moluccas as much as 248.445. 000rupiahs. And from the national revenue and budget as much as Rp295.000.000.

The funds allocation derived from regional budget of the province of Moluccas for the sub-sector of tourism during Pelita III have been utilized for the activities : marketing promotion of tourism as big as Rp98.778.000, or the same as 39,76% of the total existing allocation, promotion of tourism objects as much as Rp47.342.000 (19,06%), the Moluccas pavilion at the Taman Mini Indonesia (The Indonesian Miniature) as big as Rp44.342.000 (18,01%) etc. (tourism promoting and education and training) as much a Rp19.600.000 (7,8%).

The funds allocation from the national sectoral budget for the sub-sector of tourism during Pelita III is oriented to design studies, design engineering, covering the studies on physical designs, marine tourisme, the insland of Ambon and the surroundings, the island of Ternate and surroundings, design engi-

Tabel / *Table III — 38*

PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEPARIWISATAAN SELAMA PELITA III
DEVELOPMENT ON TOURISM INDUSTRY DURING PELITA III

No	Industri Pariwisata / *Tourism industry*	Tahun 1979 / *Year 1979*	Tahun 1983 / *Year 1983*	Keterangan / *Explanation*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Akomodasi/*Accomodation*	38 buah	59	Jumlah hotel berbintang 1 = 5 bh. vakni : Cendrawasih, Mutiara, Amboina, Abdullalie dan Eleonor. *The amount of one star hotels are units, namely: Cendrawasih, Mutiara, Amboina, Abdulalie, Eleanor.*
2.	Restorant/*Restaurants*	36 398()	41 720()	
3.	Souvenir Shop	16	16	
4.	Biro Perjalanan/ *Travel bureaus*	4	7	

Dalam hal pembangunan, alokasi dana untuk pariwisata selama Pelita III berjumlah Rp 543.455.000,- yang bersumber dari APBD Dati I Maluku sebesar Rp 248.445.000,- dan dari APBN sebesar Rp 295.000.000,-

Alokasi dana dari APBD Dati I Maluku untuk sub sektor pariwisata selama Pelita III telah dimanfaatkan untuk kegiatan: pemasaran wisata sebesar Rp 98.778.000,- atau sama dengan 39,7% dari jumlah alokasi yang ada, pembinaan obyek wisata sebesar Rp 47.342.000 (19,06%), paviliun Maluku di TMII sebesar Rp 44.342.000,- (18,01%) dan lain-lain (Bina Wisata dan Diklat) sebesar: Rp 19.600.000,- (7,89%).

Alokasi dana dari sumber APBN untuk sub sektor pariwisata selama Pelita III ditujukan pada studi-studi perencanaan, dan design engineering, yang meliputi studi-studi perencanaan fisik wisata Marina pulau Ambon dan sekitarnya, pulau Ternate dan sekitarnya, design engineering obyek wisata pulau Ternate, konstruksi pembangunan fasilitas umum pantai Honimua, study pengembangan obyek wisata Dati II Maluku Tenggara dan Maluku Tengah. Alokasi yang terbesar adalah study pengembangan obyek wisata Dati II Maluku Tenggara sebesar Rp 85.000.000,- (28,81%) dari alokasi dana selama Pelita III.

Apabila kita bandingkan jumlah alokasi dana Pemerintah untuk sub sektor pariwisata dengan hasil devisa yang diterima selama Pelita III jelas terlihat bahwa saham pariwisata bagi pembangunan Daerah Maluku semakin besar. Lihat Tabel III-39.

7. Perdagangan

Struktur ekonomi daerah yang agraris dan berorientasi ke perdagangan ekspor menempatkan sektor perdagangan Dati I Maluku sebagai salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Selama Pelita III, kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB mencapai 15,73% dan menempati urutan kedua setelah sektor pertanian.

Hasil-hasil produksi baik produksi pertanian, perindustrian maupun pertambangan selain mempunyai pasaran di luar daerah, juga merupakan komoditi ekspor non migas yang penting di pasaran dunia. Sementara itu hampir seluruh keperluan pokok masyarakat dan bahan penting lainnya seperti bahan penolong dan barang modal, sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain ataupun diimpor.

Dalam hubungan ini tanaman perkebunan yang merupakan komoditi perdagangan yang sangat dominan hampir seluruhnya dimiliki dan diusahakan oleh rakyat, sehingga peningkatan di sektor ini selain menambah devisa negara dan pendapatan daerah, juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Keadaan demikian mengakibatkan kegiatan perdagangan, baik di bidang ekspor maupun di bidang pengadaan distribusi menjadi sangat penting, sehingga perlu dikembangkan secara konsepsional dan terpadu.

Dalam Pelita IV, usaha-usaha yang akan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan perdagangan di daerah ini, juga diarahkan memperlancar penyaluran barang dan jasa antara produsen dan konsumen dalam ruang lingkup lokal, regional dan internasional agar menunjang peningkatan produksi dan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

a. Perdagangan Luar Negeri

Selama Pelita III (1979—1983) jumlah nilai ekspor daerah Maluku mencapai US $ 625,86 juta, dengan kenaikan rata-rata sebesar 15% setahun. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor yang cukup tinggi pada dua tahun pertama Pelita III yakni masing-masing sebesar 96,26% dan 42,92%.

Tahun 1981 dan 1982, sebagai pelaksanaan SKB Tiga Menteri yang membatasi ekspor kayu log guna menunjang pembangunan industri kayu dalam negeri, disamping dampak resesi ekonomi dunia, nilai ekspor secara keseluruhan menurun masing-masing sebesar 42% dan 33,13%. Sedangkan dalam tahun 1983 walaupun volume ekspor rata-rata mengalami penurunan sebesar 0,95%, namun nilainya meningkat dengan 7,97%.

Sementara itu jumlah komoditi ekspor selama Pelita III mencapai 32 jenis, yang berarti suatu kenaikan sebesar 28% bila dibandingkan dengan jumlah komoditi ekspor dalam Pelita II. Komoditi tersebut meliputi hasil-hasil hutan, hasil laut, hasil perkebunan, hasil industri, hasil tambang dan hasil-hasil lainnya, yang seluruhnya merupakan komoditi ekspor non migas.

Pada kelompok hasil hutan, kayu log merupakan komoditi ekspor yang dominan walaupun selama tahun 1979 - 1983 volume ekspornya turun rata-rata sebesar 14,84% namun nilai ekspornya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9,52%. Nilai ekspor tertinggi dicapai tahun 1980 yaitu sebesar US $ 143,41 juta atau sekitar 70,71% dari seluruh nilai ekspor pada tahun tersebut. Dan selama Pelita III konstribusi hasil

neering of tourism objects on the insland of Ternate, construction of general facilities of the beach of Honimua, the development study on tourism objects in the district of Southeast Moluccas and the Central Moluccas. The mosth biggest allocation is the development study on tourism objects in the district of southeast Moluccas as big as Rp85. million. (28,81%) of the funds allocation during Pelita III.

If we compare the amount of funds allocation by the government for the sub-sector of tourism with the input of foreign exchange received during Pelita III is clearly seen that the tourism shares for the development of the province of Moluccas is more and more boosting. See Table III-39.

Tabel / *Table III — 39*

JUMLAH INVESTASI UNTUK PARIWISATA DAN HASIL DEVISA YANG DIPEROLEH SELAMA PELITA III
THE AMOUNT OF INVESTMENT FOR TOURISM AND THE AVAILABLE FOREIGN EXCHANGE DURING PELITA III

Tahun *Year*	Jumlah Investasi (Rp 000) *The amount of investment (Rp thousand)*	Jumlah Devisa (US $) *The amount of foreign exchange (US $)*
(1)	(2)	(3)
1979	10.000	672.480
1980	98.506	692.280
1981	144.738	852.120
1982	164.125	822.150
1983	126.076	2.770.425

7. Trade and Commerce.

The economical structure of an agrarian characteristic and oriented to export trade and commerce has placed the sector of trade and commerce in the province of Moluccas as on of the sectors that is holding important roles in the development of regional economy. During Pelita III, the contribution of this sector in the forming of DPRD reches 15,73% and gets the second ranking after the sector of agriculture.

The production, either agricultural of industrial and mining, not only having the marketing outside the region, also form the export commodities of non-oil and gas, which is important in the marketing of the world. Meanwhile nearly all the primary needs of the society and other important materials, like the sustaining materials and capital goods, mostly area imported from other regions or from abroad.

With regard to this fact the plantation crops which are the commodities for the trade and commerce of the most dominant, are nearly all bing exploited by the population, so that the acceleration in this sector, except accuring the foreign exchange and regional income, also increasing the income of the population.

Such as condition effects the activities of trade and commerce, either in the export field, or in the field of distribution, has become very important, so that it is necessary to be developed in a conceptual an integrated manner.

In Pelita IV he efforts being done in the achieving the trading and commercial objectives in this region, have been directed to make the fluent flow of goods and services, betwen the producers and the consumers, that is can sustain the production increase, and broaden the employment opportunities, and increase the public income.

a. Foreign trade and commerce

During Pelita III (1979 – 1983) the amount of export value in the Moluccas reaches US $ 625,86 million, with the increase average of about 15% per year. This increase is mainly caused by the increase of export value which is quite high in the two first years of Pelita III, namely as much as 96,26% and 42,92% each.

In the year 1981 and 1982, as the implementation of joint decision of three ministers that limited the export of logwood to sustain the development of wood industry in the homeland, except the impact of world economic recession, the export value on the whole is declining 42% and 33,13% each. While in the year 1983, although the export volume has the average decline of 0,95%, but the value is increasing with 7,97%.

In the other hand the amount of export commodities during Pelita III as reached 32 types, which means an increase as much as 28% if compared with the amount of export commodities in Pelita II. Such commodities are comprising forest products, sea products, plantation products, industrial products, mining products, and other products, that on the whole form the non-oil and gas export commodities.

In the forest products group, the logwood is the mosth dominant export commodity, although during the year 1979 – 1983 the export volume decreases

hutan dengan nilai ekspor daerah sekitar 57,25% atau sebesar US $ 358 juta.

Kemudian udang dan ikan segar merupakan dua jenis komoditi yang dominan dari 11 jenis laut yang diekspor. Sejak tahun 1979 - 1982 volume dan nilai ekspor udang terus menurun, namun pada tahun 1983 volume dan nilainya meningkat masing-masing sebesar 7,31% dan 26,61%. Dalam Periode yang sama volume ekspor ikan segar mengalami kenaikan rata-rata sebesar 17,97% sedangkan nilainya meningkat rata-rata sebesar 29,95% setahun. Jumlah nilai ekspor hasil laut selama Pelita III mencapai US $ 154,81 juta atau 24,74% dari total nilai ekspor daerah dalam periode yang sama.

Di kelompok hasil perkebunan, coklat dan pala merupakan dua komoditi yang cukup potensial. Selama Periode Pelita III volume ekspor coklat mengalami kenaikan rata-rata sebesar 89,54% dan nilainya naik rata-rata sebesar 107,10%. Sementara itu komoditi pala terus menerus mengalami penurunan baik volume maupun ekspornya yakni masing-masing sebesar 2,85% dan 3,39%. Kurang berkembangnya ekspor pala selama Pelita III terutama disebabkan belum adanya kesatuan tindak dari para eksportir sehingga tidak dapat memanfaatkan peranan Indonesia yang merupakan negara produsen utama pala dunia. Oleh karena itu konstribusi komoditi perkebunan pada nilai ekspor daerah selama Pelita III hanya sebesar US $ 25,77 juta atau sekitar 4,12%.

Sejalan dengan upaya pengembangan industri dalam negeri, kegiatan ekspor produk-produk industri pun terus diintensifkan. Sejak Pelita II papan merupakan satu-satunya produk industri yang terus menerus diekspor. Sedangkan selama Pelita III volume ekspornya mengalami kenaikan rata-rata sebesar 78,55% setahun, sedangkan nilainya meningkat rata-rata 89,17% setahun.

Pada tahun terakhir Pelita III daerah Maluku mulai mengekspor kayu lapis sebanyak 12,06 ribu M³ dengan nilai sekitar US $ 2,38 juta. Hasil industri lainnya yang juga diekspor adalah minyak kayu putih, minyak pala, veener dan hasil kerajinan. Nilai ekspor hasil industri sejak tahun 1979 sampai dengan 1983 rata-rata meningkat 89,59% setahun, sementara konstribusinya pada nilai ekspor daerah hanya 3,39%.

Pada tahun 1979 untuk pertama kalinya daerah Maluku mengekspor hasil tambang nikel dari pulau Gebe. Walaupun ekspor selama Pelita III meningkat dengan rata-rata 16,31% setahun, namun nilainya mengalami penurunan rata-rata sebesar 12,39%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa menurunnya nilai ekspor nikel dan hasil tambang lainnya bukan disebabkan berkurangnya volume ekspor tetapi disebabkan oleh turunnya harga komoditi tersebut di pasaran.

Pada tahun 1980 harga nikel mencapai US $ 40,58 per ton, sedangkan pada tahun 1983 hanya sebesar US $ 16,67 ton, dan satu-satunya negara tujuan ekspor nikel selama Pelita III adalah Jepang.

Selain nikel daerah Maluku juga mengekspor magaan dan laterifeore. Nilai ekspor selama Pelita III sebesar US $ 6,96 atau 1,11% dari total nilai ekspor sebesar US $ 625,86 juta.

Perkembangan ekspor dalam kelompok komoditi lainnya selalu berfluktuasi selaras dengan perkembangan harga di pasaran, potensinya memang belum dikembangkan secara maksimal. Lihat Grafik III-2.

Pada tahun 1979, kayu log menyumbang sebesar 68,11% udang 19,97% sedangkan nikel hanya 5,15%. Tahun 1980 sumbangan kayu log pada nilai ekspor daerah meningkat menjadi 70,71% sedangkan udang dan nikel turun masing-masing 10,85% dan 2,59%.

Sejak tahun 1981, komposisi ini terus berubah menuju kesinambungan konstribusi dimana pada tahun terakhir Pelita III yakni tahun 1983 kontribusi kayu log dan udang agak berimbang yakni masing-masing 35,55% dan 28,72%, sedangkan nikel hanya sebesar 7,38%, papan 6,97% dan mutiara 5,21%. Pada saat yang sama, kontribusi komoditi lainnya seperti coklat, pala, ikan segar dan kayu lapis terus meningkat.

Kenyataan tadi ternyata hanya beberapa komoditi dari 32 jenis komoditi yang mendominasi nilai ekspor, merupakan suatu kelemahan dalam struktur ekspor daerah. Selain itu, kecilnya nilai ekspor dari sebahagian besar komoditi bukanlah disebabkan oleh potensinya yang kecil, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor lain seperti kontiunitas produksi, kurangnya informasi pasar, masih kurangnya wiraswasta belum dikembangkan teknologi pengolahan dan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang.

Nilai ekspor tahun 1985 dibanding tahun 1984 terdapat penurunan sebesar 12,306. Hal ini disebabkan karena menurunnya volume ekspor dari jenis komoditi tertentu dan merosotnya komoditi ekspor yang memakai satuan Kg mengalami sedikit kenaikan yakni dari 443.042.648 Kg pada tahun 1984 menjadi 588.123.355 Kg pada tahun 1985. Namun jenis komoditi yang menggunakan satuan M³ mengalami penurunan sampai 47,87% yang pada tahun 1984 sebesar 387.322 M³ menjadi 201.899 tahun 1985.

on the average of 14,84%, but the export value has got increased on the average of 9,5%. The highest export value achieved in the year 1980 is US$ 143,41 million or about 70,71% of the whole export value in the same year. During the Pelita III the contribution of forest products with the regional export value about 57,25% or US$ 358 million.

Then shrimps and fresh fishes are two kinds of commodities dominant from the 11 kinds of sea products exported. Since the year 1979 till 1982 the volume and export value of the shrimps are declining, but in the year 1983 the volume and the export value have increased as big as 7,31% and 26,61% each. In the similar period the volume of export on fresh fishes has undergone increase on the average of 17,97% while the value increased as big as 29,95% per year. The total export value of sea products during Pelita III has reached US$ 154, 81 million or 24,74% of the total regional export value in the same period.

Within the plantation products group, cocoa and nutmegs are to commodities of great potentials. During Pelita III the volume of exported cacao has undergone average increase of 89,54% its value increase the average of 107,10%. On the other hand, the nutmeg commodity constantly declines, either the volume or the export value, namely as big as 2,85%, and 3,39%.

The lack of improvement on the nutmeg export during Pelita III is mainly due to the absence of integral actions of the exporters, so that they cannot take advantages of the Indonesian role as the world producing nutmegs country. Therefore the contribution of plantation commodities in the export value of the region during Pelita is only as much as US $ 25,77 million or about 4,12%.

Paralell with the efforts in development of domestic industry, the export activitiets on industrial products are constantly intensified. Since Pelita II the wood shelves has become the only industrial product that are being exported. During Pelita III its export volume has undergone an increase of the average of 78,55% a year, while its value increase the average of 89,17% year.

In the last year of Pelita III the region of Moluccas begins to export plywood as many as 12,06 thousand m3 with the value of US $ 2,38 million. The other industrial product that also has been exported is cajput oil, nutmeg oil, veener, and handicrafts products. The export value from industrial products since 1979-1983 increase the average of 89,59% a year, while the contribution to the regional export value is only 3,39%.

In the year 1979 for the first time the region of Moluccas export the nickel mining product from the island of Gebe. Although the export during Pelita III increase the average of 16,31% a year, but its value undergoes a decline of average of 12,39%. This reality is an indicator that the decline of nickel export value and other mining products are not caused by the decline of export volume, but because of the decrease of price of the commodity concerned in the market.

In the year 1980 the nickel price has reached US$ % 40,58 per ton, while in the year 1983 only US$ 16,67 per ton. An the only of export destination of nickel during Pelita III IS Japan.

Except nickel the Moluccas also exports mangan, and laterite ore, The export value during Pelita III is as much as US$ 6,96 or 1,11 % of the total export value of US$ 625,86 million.

The development of export in the other commodities group are always fluctuating parallel with the price development in the market, its potentiality has not yet been developed to the maximum level. See Graphic III–2

In the year 1979 the logwood contributes 68,11% shirips 19,97%, while nickel only 5,15%. In the year 1980 the logwood contribution to the export value of the region increase to 70,71% while shrimps and nickel decrease each to 10,85% and 2,59%

Since the year 1981, this composition constantly undergoes alteration towards the continuation of contribution of which in the last year of Pelita III, namely in 1983, the contribution of logwood and shrimps are rather balanced, namely raspectively 35,55% and 28,72% each, while nickel only as big as 7,38%, wood shelves 6,97%, and pearls 5,21%. In the same period, the contribution of other commodities such as cocoa, nutmegs, fresh fishes, and plywood are constantly increasing.

From this fact turns out that only some commodities of the 32 commodities that are dominating the export value, which becomes a weakness in the structure of regional export. Besides that, the small amount of export value of the most commodities is not due to its little potentiality, but is more caused by other factor such as the continuity of production, lack of market information, lack of private enterpreneurs, not yet developed of the technological manufacturing, and the limitations of means and sustaining infrastructure.

The export value of 1985 compared with 1984 there is a decline of 12,30%. This fact is due to the decrease of export volume from certain types of commodities and the decrease of export commodities. Using the kg units undergoes a little bit increase namely from 443.042.648 kg in the year 1984 into 588.123.355 kg in the year 1985. Neverheless the types of commodities using cubic metres undergo decrease to 47,87% which is in the year 1984 is as big as 387.322 m3 becomes into 201.899 m3 in the year 1985.

During Pelita III the import activities of this region is still small is compared to the export activities. This fact is caused by the imported goods being most-

Selama Pelita III kegiatan impor daerah ini masih kecil dibandingkan dengan kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan karena barang-barang impor sebagian besar dimasukkan ke daerah Maluku secara langsung. Sedangkan impor langsung ke daerah Maluku selama Pelita III rata-rata hanya berkisar US $ 5,45 juta berupa barang-barang modal dan suku cadang yang dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha PMA dan PMDN.

b. Perdagangan Dalam Negeri

Perkembangan perdagangan dalam negeri selama Pelita III menunjukkan peningkatan yang berarti, baik dilihat dari perkembangan arus barang keperluan pokok dan penting/strategis maupun perkembangan lembaga perdagangan (institusi) yang menggerakkan aktivitas perdagangan di daerah ini. Disamping itu selama Pelita III perkembangan harga barang kebutuhan pokok penting/strategi dapat dikendalikan pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Melalui mekanisme pengadaan dan penyaluran yang cukup seimbang dan merata. Menjangkau seluruh wilayah kepulauan Maluku serta ditunjang dengan monitoring harga dan stock barang di pasaran.

Adapaun perkembangan pengadaan dari penyaluran bahan-bahan kebutuhan pokok, penting/strategis di Dati I Maluku selama Pelita III dapat digambarkan sebagai berikut:

B e r a s

Pengadaan beras selama Pelita III berjumlah 324.634 ton dengan perincian: tahun 1979 berjumlah 56,308 ton meningkat pada tahun 1980 sebesar 25,53% atau 70.685 ton dan meningkat lagi sebesar 4,12% atau sebesat 73.597 ton dan di tahun 1981 dan 1982 meningkat sebanyak 8,31% menjadi 79,711 ton serta mengalami penurunan pada tahun 1983 menjadi 44.333 ton atau 44,48%. Rata-rata pengadaan beras selama Pelita mengalami penurunan sebesar 1,61%.

Jumlah penyaluran beras sebesar 292,741 ton dengan perincian 55.816 ton pada tahun 1979 meningkat di tahun 1980 menjadi 59,488 ton atau 6,58% dan meningkat lagi pada tahun 1981 menjadi 71.825 ton atau 20,74%. Pada tahun 1982 dan tahun 1983 mengalami penurunan masing-masing 60.547 ton atau 15,70% dan 45,70% dan 45.038 ton atau 25,6%. Sedangkan rata-rata penyaluran mengalami penurunan sebesar 3,50%.

Gula Pasir

Pengadaan gula pasir, selama Pelita III berjumlah 78.992 ton dengan perincian tahun 1979 sebesar 5.967 ton meningkat di tahun 1980 menjadi 12.293,5 ton atau 106,02% dan meningkat lagi pada tahun 1981 menjadi 26.815,60 atau 118,13%. Pada tahun 1983 mengalami penurunan masing-masing 23.913 ton atau 10,82% dan 9,933 ton atau 58,46%.
Pengadaan gula pasir selama Pelita III rata-rata mengalami kenaikan sebesar 28,72%.

Jumlah penyaluran sebesar 68.809,60 ton dengan perincian tahun 1979 sebesar 5.873 ton dan mengalami kenaikan dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 masing-masing sebesar 8.716 ton atau 48,44%; 21.211,90 ton atau 143,31% dan 22.952,70 ton atau 8,21%. Pada tahun 1983 mengalami penurunan menjadi 10.054 ton atau 56,20%. Penyaluran gula pasir selama Pelita III mengalami kenaikan rata-rata sebesar 35,94%.

T e r i g u

Pengadaan terigu berjumlah 54,813 ton dengan perincian pada tahun 1979 sebesar 6.800 ton dan meningkat pada tahun 1980 dan tahun 1981 masing-masing sebesar 10.094 ton atau 48,44% dan 13.491 ton atau 33,65%.

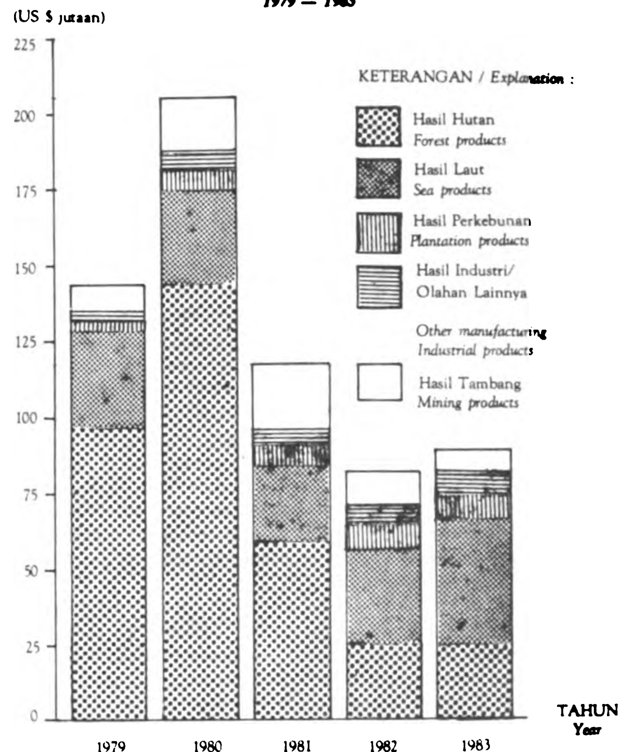
Kemudian dari keadaan tersebut terjadi penurunan pada tahun 1982 dan tahun 1983 masing-masing sebesar 12.632 ton atau 16,37% dan 11.822 ton atau 6,41%. Pengadaan terigu selama Pelita III mengalami kenaikan rata-rata sebesar 17,33%.

Adapun penyaluran seluruhnya berjumlah 49.487 ton dengan perincian pada tahun 1979 sebesar 6.668 ton dan mengalami kenaikan pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 masing-masing 8.718 ton atau 30,74%, 11.216,50 ton atau 28,66% dan 12.079 ton atau 7,85%. Pada tahun 1982 mengalami penurunan menjadi 10.787,50 ton atau sebesar 10,82%. Penyaluran terigu selama Pelita III rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14,11%.

Untuk dapat mengikuti perkembangan sampai tahun 1985/86 berikut dimuat Tabel perkembangan pemasukan beras, gula pasir dan tepung terigu oleh Depot Logistik Maluku tahun 1980/1981 s/d 1985/1986 pada Tabel III - 40

Grafik / Graphic III — 2

PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAERAH MALUKU 1979 — 1983
THE DEVELOPMENT OF EXPORT VALUE OF MOLUCCAS PROVINCE 1979 — 1983



ly delivered into the Moluccas straight away. While the direct import to the region of Moluccas during Pelita III has the average of US$ 5,45 million in the form of capital goods and spareparts which are done by the enterpreneurs of foreign and domestic capital investments.

b. Domestic trade and commerce

The development of domestic trade and commerce during Pelita III shows significant boost, viewed from the point of the flow of primary necessity goods and the importance/strategy of the development of commercial institutions that motivate the trading activities in this region. Besides that during Pelita III the development of goods price which are important can be controlled to a decent level and being able to be achieved by the purchasing capacity of the society. Throught the mechanism of supply and distribution of well-balance and equitable, reaching all the areas of the province Moluccas and sustained by the price monitoring and goods stock in the market.

The development of supply and distribution of primary necessities, important/strategic, in the province of Moluccas during Pelita III can be described as follow :

Rice

The supply of rice during Pelita III is of the amount of 324.634 ton with the details of : in the year 1979 the amount of 56,308 tons increase again as much as 1,12 % or 73.597 tons in the year 1981, and in the year 1982 increase as much as 8,31% or 79.711 tons and decreases in the year into 44.333 tons or 44,48%. The average supply of rice during Pelita III gets a decrease of 1,61%.

The amount of rice distributed as much as 292.741 tons with the following detail : 55.861 tons in the year 1979, increase in the year 1980 into 59.488 tons or 6,58% and increase again in 1981 into 71.825 tons or 20,74%. In the year 1982 an d1983 has the decline each 60.547 tons or 15,70% and 45.038 tons or 25,61%. The everage distribution has the decrease of 3,50 %.

White sugar

The supply of white sugar during Pelita III is the amount of 78.992 tons with the details : in the year 1979 as much as 5.967 tons increase in the year 1980 into 12.293,5 tons or 106,02%, increase again in the year 1981 into 26.815,60 tons or 118,13 %. In the year 1982 had 1983 has a decreas each 23.913 tons or 10,82% and 9.933 tons or 58,46 %. The supply of white rice during Pelita III has the average of increase of 28,72%.

The amount of distribution as much as 68.809,60 tons with the details in the year 1979 as much as 3.873 tons and gets an increase in the year of 1980 to 1982 respectively as much as 8.716 tons or 48,44% ; 21.211,90 tons or 143,31%; 22.952, 70 tons or 8,21%. In the year 1983 it gets a decrease

Semen

Pengadaan semen selama Pelita III berjumlah 311.954,6 ton dengan perincian, pada tahun 1979 berjumlah 42.778 ton dan mengalami kenaikan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 masing-masing dengan tahun 1982 masing-masing 47.685 ton atau 11,47% dan sebanyak 69.736,60 ton atau 46,24% serta 79.303 ton atau 13,72% sedangkan tahun 1983 mengalami penurunan menjadi 72.452 ton atau 8,64%. Selama Pelita III rata-rata kenaikan mencapai rata-rata 14,11%.

Pupuk

Pengadaan pupuk di Maluku selama Pelita III berjumlah 30.897,95 ton dengan perincian pada tahun 1979 berjumlah 400 ton yang mengalami kenaikan pada tahun 1980 menjadi 15.490,31 ton atau 3.772,58%. Kemudian pada tahun 1981 dan 1982 mengalami penurunan masing-masing sebesar 3.340,23 ton atau 78,44% dan 2.626,14 ton atau 21,38% dan mengalami kenaikan pada tahun 1983 menjadi 9.041,27 ton atau 244,28%.

Kebutuhan pupuk untuk daerah Maluku relatif kecil, dimana masih terbatas dalam memenuhi Bimas/Inmas dan Bimas tanaman padi dan palawija khususnya di daerah transmigrasi. Lihat Tabel III-40.

Tabel / *Table III — 40*

PERKEMBANGAN PEMASUKAN BERAS, GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU OLEH DEPOT LOGISTIK MALUKU TAHUN ANGGARAN 1980/1981 — 1985/1986

DEVELOPMENT OF IMPORTED RICE, WHITE SUGAR, WHEAT FLOUR BY THE DEPOT LOGISTICS IN THE MOLUCCAS FOR FISCAL YEAR 1980/81 — 1985/86

Tahun Anggaran *Fiscal year*	Pemasukan (Ton) / *Imported (in tons)*		
	Beras *Rice*	Gula Pasir *White sugar*	Tepung Terigu *Wheat flour*
(1)	(2)	(3)	(4)
1980/1981	58.788,5	11.830,3	12.027,0
1981/1982	56.124,7	16.778,7	12.038,0
1982/1983	30.946,0	14.336,7	10.503,0
1983/1984	45.441,8	12.120,7	13.102,2
1984/1985	24.450,0	11.423,7	9.402,9
1985/1986	23.350,0	8.380,3	8.692,6

Adanya peningkatan pengadaan dan penyaluran barang-barang tadi disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya meningkatnya jumlah permintaan masyarakat sebagai akibat meningkatnya pendapatan riel dan daya masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk (adanya program transmigrasi). Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan adanya kegiatan pembangunan, baik oleh Pemerintah maupun pihak swasta.

Selanjutnya dengan adanya program pembinaan bagi pengusaha golongan ekonomi lemah dan generasi muda, telah memberikan pengaruh pula terhadap sikap wiraswasta melalui kegiatan penataran, penyuluhan dan kunjungan konsultasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan manajemen pengolahan usaha golongan ekonomi lemah.

Sejalan dengan program pembinaan yang telah dilaksanakan sampai tahun 1983 tercatat berhasil dibina sebanyak 769 pengusaha nasional golongan ekonomi lemah. Diantaranya 6.665 buah perusahaan telah diberi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dalam upaya pelaksanaan UU No 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sehingga telah terdaftar sebanyak 1.500 buah perusahaan (berstatus pendaftaran sementara).

Perkembangan usaha ini ditunjang oleh kebijaksanaan tentang penyempurnaan dan penyederhanaan prosedure izin usaha (SK Menteri Dagkop No 428), dan pelimpahan wewenang pemberian SIUP oleh Kepala Kantor Perdagangan di Kabupaten. Menciptakan jalinan hubungan kerjasama antara pengusahaan golongan ekonomi lemah dengan pesero niaga yang kesemuanya ini turut mendorong pertumbuhan usaha perdagangan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara lebih merata.

Dalam usaha menciptakan kepastian usaha bagi para pengusaha khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah, telah dibangun fasilitas tempat usaha dengan biaya/sewa yang relatif murah melalui program pembangunan pasar Inpres.

Pembangunan Inpres pasar di Maluku dimulai sejak tahun anggaran 1976/1977 sampai tahun anggaran 1978/1979 dan berhasil membangun 21 buah pasar yang tersebar di berbagai Daerah Tingkat II. Aktifitas ini sekaligus membantu pengusaha memperoleh tempat usaha dengan

into 10.054 tons or 56,20%. The distribution of white sugar during Pelita III has and increase of 35,94%.

Wheat Flour

The wheat flour supply has the amount of 54.813 tons with the details : in the year 1979 as much as 6.800 tons, increases in the year 1980 and 1981 each 10.094 tons or 48,44% and 13.491 tons or 33,65%. From this situation there is an decline in the year 1982 and 1983 each as much as 12.632 tons or 16,37% and 11. 822 tons or 6,41%. The supply of wheat flour during Pelita III within the average of 17,33%.

The total distribution is 49.487 tons with the following details in the year 1979 as much as 6.668 tons and gets an increase in the year 1980 till the year 1982, each respectively 8.718 tons or 30,74%; 11.216,50 tons or 28,66% ; 12.079 tons or 7,85%. In the year 1983 a decrease takes place as much as 10.787,50 tons or as much as 10,82%. The distribution of wheat flour during Pelita III has the increase average of 14,11%.

In order to be able to follow the development till the year 1985/1986 we lay down a table concerning the imports of rice, white sugar, and wheat flour by the department of logistics in the Moluccas in the year 1980/1981 till the year 1985/1986 in the table III−40.

Cement

The supply of cement during Pelita III has the amount of 311.954,6 tons with the following details : in the year 1979 as much as 42.778 ton and increases since 1980 till 1982 each respectively 47.685 tons or 11,47% and 69.736,60 tons or 46,24%, and 79.303 tons or 13,72%, while in the year 1983 it gets a decline of 72.452 tons or 8,64%. During Pelita III the average increase reaches 14,11%.

Fertilizer.

The supply of fertilizer in the Woluccas during Pelita III has the amount of 30.897,95 tons with the details : in the year 1979 as much as 400 tons, which gets an increase in the year 1980 as much as 15.490,31 ton or 3.772,58%. Then in the year 1981 and 1982 gets a decrease each respectively 3.340,23 tons or 78,44% and 2.626,14 tons or 21,38%, and gets an increase in the year 1983 into 9.041,27 tons or 244,28%.

The needs for fertilizer in the Moluccas is relative small, which is still limited to fulfill bimas/inmas and paddy bimas and secondary crops, especially in the transmigration areas.

The existence of increase in the distribution and supply of those goods mentioned above are effected by some factores. Among them, the increase of the public demands as the results of the increase in the real income and the capacity of the society. The increase of population (the existence of transmigration program). The increase of job opportunities, and enterprise opportunities, with the existence of development activities, either by the goverment or by the private institutions.

Further by the presence of the programs on the promoting of puny economic groups and the young generation, has given an influence too to the attitude of entrepreneurship via the activities of upgrading courses, information, and consultative visits with the intention to enhance the knowleged, skilled management, conducting the enterprises of the puny economic group.

Parralel with the program of promoting being conducted till the year 1983 there have been promoted as many as 769 enterpreneurs of the puny economic group. Among them 6.665 companies have been given the lisense for trade and commerce (SIUPP), and in the efforts to implement the Law no 3 year 1982 on the compulsory enrollment of enterprises, so that there have been enlisted as many as 1500 companies (in the status of contemporary enrollment).

The development of this enterprise in sustained by the policy on the perfect and simplication of procedure of enterprise licence (the minsister's letter of decision of the Minister of Trade, Commerce and Coopratives no 428) and the ratification of authority of the issueing of the license by the chief officer of the district trade and commerce service. To create a network of cooperation between the puny economic enterpreneurs and the shareholders of business world of which all stimulate the growth of business enterprise, extensification of employment opportunities and the increase of public income in a more equitable distribution.

In the efforts to create a secure enterprise for the enterpreneure, especially for the puny economic enterpreneure there have been built facilities for enterprise activities with the expenses/rents which is relatively cheap through the program of construction of the Inpres market.

The development of Inpres market in the Moluccas has begun since the fiscal year 1976/1977 till the fiscal year of 1978/1979 and succeeds in construction 121 markets scattered throughout the districts areas. This activity stimultaneously sustain the enterpreneurs to get locality of enterprise with a cheap cost and eventually would take hold of the existence of the national

biaya yang murah dan pada gilirannya akan mempertahankan eksistensi pengusaha nasional, khususnya golongan ekonomi lemah pada pusat-pusat perdagangan.

Disamping itu telah ditempuh kebijaksanaan yang bertujuan memberikan kepastian berusaha dan peningkatan pendapatan harga dasar (floor price) pembelian tingkat petani. Namun demikian disadari bahwa kegiatan perdagangan/pemasaran itu besifat dinamis, sehingga sering terdapat kecenderungan yang menekan harga, walaupun bersifat jangka pendek. Hal ini tentunya disebabkan adanya perkembangan dalam arti meningkatnya produksi di daerah lain dan kapasitas produksi maupun kelemahan lain yang ada pada mekanisme pengaturan tata niaga itu sendiri.

Selama Pelita III mulai dibebankan suatu pola pembinaan sistem informasi pasar yang mengarah kepada terbentuknya pusat informasi pasar. Hal ini bertujuan agar secara periodik dapat menyampaikan data informasi pasar berbagai komoditi yang ada di pusat-pusat produksi kepada konsumen dan sebaliknya. Dengan demikian keadaan ini dapat membantu produsen mengikuti perkembangan permintaan di pasaran sehingga dapat direncanakan suatu pola produksi efektif dan efisien dalam kerangka menjamin penerimaan di satu pihak pemenuhan konsumen di lain pihak.

8. Dunia Usaha

Kegiatan dunia usaha di Dati I Maluku terdiri dari Perusahaan Milik Negara (Persero), Perusahaan Swasta Nasional, Perusahaan Swasta Asing, dan Koperasi. Dari segi kemampuan usahanya, pengusaha swasta Nasional di daerah ini berbeda tingkat kemampuannya. Ada pengusaha swasta Nasional yang relatif kuat dan ada pula terbatas kemampuannya atau tergolong dalam pengusaha ekonomi lemah.

Dari segi kegiatannya umumnya pengusaha golongan ekonomi lemah selain bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi, juga bergerak dalam sektor industri, khususnya industri kecil atau industri rumah tangga dan kerajinan rakyat.

Berdasarkan inventarisasi perusahaaan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Maluku, maka pemberian ijin usaha perdagangan sampai dengan akhir Desember 1982 tercatat sebanyak 5.683 perusahaan. Lihat Tabel III-41.

Tabel / *Table III — 41*

PERKEMBANGAN PERUSAHAAN MENURUT PENGGOLONGAN JENIS USAHA, TAHUN 1979 - 1982
DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ACCORDING TO CLASSIFICATIONS OF TYPES OF ENTERPRISE, YEAR 1979 — 1982

	Penggolongan menurut jenis usaha *Classification according to the types of enterprise*						Jumlah Seluruhnya *Total amount*
	Per. Besar *Big enterprise*		Per. Menengah *Mediorcre enterprise*		Per. Kecil *Small enterprise*		
	Non Pri *Non native*	Pri *Native*	Non Pri *Non native*	Pri *Native*	Non Pri *Non native*	Pri *Native*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1979	—	—	—	—	—	—	3.321
1980	179	54	678	476	907	1.478	3.872
1981	187	179	728	680	981	2.009	4.744
1982	194	191	795	912	1.080	2.511	5.683

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Maluku
Source : The representative office of the Department of Trade in the province of Moluccas.

Pertumbuhan selama periode 1979 - 1982 adalah sebesar 71,12% atau rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 19,61%.

9 PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)

Sejak Pelita I di Daerah Tingkat I Maluku telah ada kegiatan PMA maupun PMDN, tercatat 4 (empat) perusahaan PMDN yang beroperasi dengan investasi sebesar US $ 11.184.800 (PMA), dan investasi untuk PMDN sebesar Rp 80.808,- juta. Kemudian selama Pelita II hanya terdapat sebuah perusahaan PMA dengan investasi sebesar US $ 2.233.400 dan 2 (dua) buah perusahaan PMDN dengan investasi Rp 1.542,7 juta. Berikutnya dalam Pelita III tercatat sebanyak 26 perusahaan PMDN dengan investasi sebesar Rp 191.519,7 juta. Sampai Desember 1986 ter-

enterpreneurship, in the particular the puny economic group in the centre of trade and commerce.

Besides that there is also taken a policy that has the intention to give secure enterprise and increase of income based on floor price by the purchase of the farmers. But it is realized that the activities of trade and commerce marketing has the dynamic characteristics, so that it often happens to be a tendency of pressing the price, although it is only for the short run. This fact is of course due to the existing development in the sense of production increase in other regions and the production capacity or other weakness, which are to be found in the regulation of trade mechanism itself.

During Pelita III a promoting pattern on marketing information system is introduced which is directed to the formation of the central information market information. This is mean to create a possibility that periodically data information can be available in the consumers and vice versa. Doing so this situation can support the producers to follow the development of demands in the market, so that it can be designed a pattern of effective and efficient production within the frame of securing the receipt of consumers in one aspect, and the fulfilling of consumer's demands in the other aspect.

8. The Enterprise World

The enterprise activities in the province of Moluccas are consisting of enterprises owned by the state (Persero), the private national entepnse, the private foreign enterprise, and cooperatives. From the aspect of enterprising capacity, the private national enterprisers in this region, are in the possession of various level of capacities. There are private national enterpreneurs who are relatively strong, and there are also those who are limited in their capacity or belonging to the puny economic group.

From the aspect of activities in general the puny enterpreneurs, besides being active in the field of trade and distribution, also are active in the industrial sector, in particular the small industries or the household industry and the folk handicraft.

With reference to the inventarization of enterprises of the official representative of the trade and commercial service of the province of Moluccas, the issue of trade license up to the end of December 1982 there are enlisted 5.683 companies. See Table III – 41.

The development during the period 1979 - 1982 is as much as 71,12% or the average per year about 19,61%.

9. The Foreign and Domestic Capital Investment (PMA/ PMDN)

Since Pelita I in the province of Moluccas there have been in existence already some foreign and domestic capital investment. There are enlisted 4 companies of foreign capital investment work in operation with US$ 11.184.800 (PMA), and the investment for PMDN/domestic capital investment as much as Rp80.808 million. Then during Pelita II only one foreign company with the investment of US$ 2.233.400 and two companies of domestic capital investment with the investment of Rp1.542.7 million. Next in the Pelita III there are recorded of 26 companies of domestic capital investment with the invesment of Rp191.519,7 million. Up till December 1986 there are 6 recorded of 26 companies of domestic capital investment with the investment of Rp191.519,7 million. Up till December 1986 there are 6 companies of domestic capital investment with the investment of Rp36.886,1 million. Concerning the foreign companies there are 5 companies with the investment value of US$ 13.418.200, and 50 companies of domestic capital with the value of Rp310.681,100 million.

From the point of view of the distribution of domestic capital/foreign capital projects in each field there are ten kinds of projects, namely the field of sector/subsector of plantation, fishery, forestry, mining, foodstuff industry, wood industry, chemical industry, service for office/shopping enterprise, real estates, and sea transportation.

In the subsector of industry the most dominant is wood with 14 projects covering investment value of Rp172.140,6 million, which is on the whole forming the activities and funds from the domestic capital invesment.

The next sector is forestry (forest exploitation/logging) as many as 19 projects (one company of foreign capital investment and 18 domestic capital investment) with the investment of US$ 1.000.000 and Rp65.825,6 million. Further the subsector of fishery with 11 projects (4 foreign and 7 domestic capital investment) with the investment value as big as US$ 12.418.200 (PMA) and Rp28.088,3 million for the domestic capital investment (PMDN). In the other sectors covering 11 projects of domestic capital with the value of Rp1.540 million till Rp12.650 million.

See Table III – 42 and III – 43.

The distribution of foreign and domestic capital investment projects in accord with the district regions are as follc[illegible] in the district of North Moluccas as many as 23 projects (one foreign [illegible] domestic capital investment)

catat 6 perusahaan PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 36.886,1 juta. Dan PMA tercatat 5 (lima) perusahaan dengan nilai investasi sebesar US $ 13.418.200,- dan 50 buah perusahaan PMDN dengan nilai sebesar Rp 310.681.100,-.

Dilihat dari penyebaran proyek PMDN/PMA per bidang usaha terdapat 10 jenis: Yaitu bidang usaha di sektor/sub sektor perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri makanan, industri kayu, industri kimia, jasa perkantoran/pertokoan, Real Estate dan angkutan laut.

Sub sektor industri nampaknya agak dominan adalah kayu yaitu dengan jumlah 14 buah proyek meliputi nilai investasi sebesar Rp 172.140,6 juta dimana seluruh dana ini merupakan kegiatan PMDN.

Sektor berikutnya adalah kehutanan (pengusahaan hutan/logging) yaitu sebanyak 19 buah proyek (satu PMA dan 18 PMDN) dengan investasi US $ 1.000.000,- dan Rp 65.825,6 juta. Selanjutnya sub sektor perikanan dengan 11 buah proyek (4 PMA dan 7 PMDN) dengan nilai investasi sebesar US $ 12.418.200 (PMA) dan Rp 28.088,3 juta untuk PMDN dengan nilai sekitar Rp 1.540 juta s/d 12.650 juta. Lihat Tabel III-42 dan III-43.

Adapun penyebaran proyek PMA dan PMDN menurut Daerah Kabupaten/Dati II adalah sebagai berikut: di Kabupaten Maluku Utara sebanyak 23 proyek (sebuah PMA dan 22 PMDN) dengan nilai investasi US $ 1 juta dan Rp 136.280,4 juta. Di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 14 buah proyek PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 103.363,5 juta; di Kodya Ambon ada 8 (delapan) buah proyek PMDN senilai Rp 43.495,2 juta; Di Kabupaten Halmahera Tengah ada sebanyak 4 (empat) buah proyek PMDN dengan nilai investasi Rp 24.242,8 juta dan di Kabupaten Maluku Tenggara ada 6 (enam) buah proyek terdiri dari 4 (empat) buah PMA senilai US $ 12.418.200 dan 2 (dua) buah PMDN senilai Rp 3.299,2 juta. Lihat Tabel III-44.

Dari 55 buah proyek, 5 (lima) buah proyek PMA dengan investasi sebesar US $ 13.418.200 telah direalisir senilai US $ 14.079.700 (105.1%) sedangkan 50 buah proyek PMDN telah direalisir 43 buah proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp 268.179,8 juta dan menyerap tenaga kerja asing sebanyak 152 orang dan tenaga kerja Indonesia sebanyak 11.424 orang.

Kegiatan ekspor bagi perusahaan-perusahaan PMA/PMDN seluruhnya sebesar US $ 105.067.167,78 dengan volume 12.330.947,47 Kg dan 356.414,95 M^3, serta diekspor ke 19 negara tujuan. Adapun keseluruhan ekspor Propinsi Maluku pada tahun 1986 sebesar Us $ 138.872.680,-. Ini berarti 75,66% ekspor Maluku disumbangkan oleh perusahaaan PMA/PMDN yang meliputi usaha-usaha industri kayu (plywood, sawn timber, vinner) memberikan sumbangan terbesar yaitu US $ 76.681,621,45 dan diikuti bidang perikanan (ikan, udang, mutiara, cumi-cumi dan kulit mutiara) sebesar US $ 26.859.028,-.

a Pelaksanaan Keppres 14 A Tahun 1980

Dalam upaya pelaksanaan Keppres 14A tahun 1980, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku No KPTS/768/GMAL/1980 tanggal 16 Nopember 1980 telah dibentuk panitia Prakualifikasi Daerah Tingkat I Maluku. Adapun perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) untuk tahun anggaran 1981/1982 baik yang bergerak dalam bidang pekerjaan pemborongan maupun dalam bidang pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku No 517/616/1982 tanggal 7 Juli 1982 di seluruh Maluku adalah 562 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang masuk dalam DRM Pemerintah tahun 1982 adalah sebanyak 402 buah dengan perincian sebagai berikut:

(1) Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi meliputi perusahaan pribumi 266 buah dan perusahaan non pribumi 39 buah;
(2) Suplier/leveransir meliputi perusahaan pribumi 73 buah dan perusahaan non pribumi 3 buah.
(3) Instalasi listrik meliputi perusahaan pribumi 18 buah dan non pribumi 3 buah.

b Pembangunan Pasar

Pelaksanaan pengadaan sarana perdagangan berupa pembangunan dan pemugaran pasar serta pembangunan pasar Inpres sampai akhir Pelita III telah dapat direalisir sebanyak 17 buah pasar baru dan pemugaran sebanyak 13 buah. Tersebar di Ibukota Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Luas pembangunan seluruhnya adalah 13.805 M^2 dengan jumlah pedagang yang ditampung adalah sebanyak 3.095 pengusaha. Jumlah biaya yang telah diinvestasi adalah sebanyak 750 juta rupiah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 581/904/1982, telah ditetapkan alokasi dana Inpres

Tabel / *Tabel III — 42*

REKAPITULASI PROYEK PMDN/PMA DI PROPINSI MALUKU SEJAK TAHUN 1967 — 1986

RECAPITULATION OF PROJECTS ON FOREIGN AND DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT IN THE PROVINCE OF MOLUCCAS SINCE 1967 — 1986

Tahun *Year*	PROYEK */ PROJECT*		INVESTASI */ INVESTMENT*		Ket. *Note*
	PMA *Foreign (PMA)*	PMDN *Domestic (PMDN)*	PMA *Foreign (PMA)*	PMDN *Domestic (PMDN)*	
1967	2	—	6.098,8	—	PMA : Dalam
1968	—	—	—	—	Ribuan Dolar
1969	—	1	—	38.092,6	PMDN: Dalam
1970	1	3	4.086,-	4.888,-	Jutaan Rupiah
1971	1	5	1.000,-	18.902,1	*PMA: In*
1972	—	4	—	5.392,1	*thousand dollars*
1973	—	2	—	13.366,2	*PMDN: In million*
1974	—	1	—	167,6	*rupiahs*
1975	—	1	—	1.357,2	
1976	—	1	—	109,5	
1977	1	—	2.233,4	—	
1978	—	—	—	—	
1979	—	1	—	2.000,-	
1980	—	3	—	8.231,6	
1981	—	12	—	127.816,6	
1982	—	6	—	33.554,-	
1983	—	4	—	19.917,5	
1984	—	—	—	—	
1985	—	4	—	21.786,1	
1986	—	4	—	21.786,1	
	5	50	13.418,2	310.681,1	

Tabel / *Table III — 43*

REKAPITULASI PROYEK PMA/PMDN MENURUT BIDANG USAHA SAMPAI DENGAN TAHUN 1986

RECAPITULATION OF PROJECTS OF FOREIGN AND DOMESTIC CAPITAL INVESTMENT ACCORDING TO FIELDS OF ENTERPRISE TILL THE YEAR 1986

Bidang-bidang *Field of Enterprise*	PROYEK / *PROJECT*		INVESTASI / *INVESTMENT*	
	PMA *Foreign Capital Investment*	PMDN *Domestic Capital Investment*	PMA *Foreign Capital Investment*	PMDN *Domestic Capital Investment*
Perkebunan/*Plantation*	—	2	—	12.650,-
Perikanan/*Fishery*	4	7	US$ 12.418,2	28.088,3
Kehutanan/*Forestry*	1	18	1.000,-	65.825,6
Pertambangan/*Mining*	—	1	—	2.067,4
Industri Makanan/ *Foodstuff industry*	—	2	—	1.787,3
Industry Kayu/*Wood industry*	—	14	—	172.140,6
Industri Kimia/*Chemical industry*	—	3	—	6.725,6
J a s a / *Service*				
- Perkantoran/Pertokoan/ *Office/Shopping*	—	1	—	14.300,-
- Real Estate/*Real Estates*	—	1	—	5.555,6
- Angkutan Laut/ *Sea transportation*	—	1	—	1.540,7
	5	50	US$ 13.518,2	310.681,1

with investment value each US$ 1 million and Rp136.280,4 million. In the district of Central Moluccas as many as 14 domestic capital investment with investment value as big as Rp103.363,5 million; in the municipality of Ambon there are 8 projects of domestic capital investment with the investment value of Rp43.495,2 million; In the district of Central Halmahera, there are 4 projects of domestic capital investment value of Rp24.242,8 million, and in the district of Southeast Moluccas there area 6 projects consisting of 4 foreign capital investment with the investment value of US$ 12.418.200 and 2 domestic capital investment with the investment value of Rp3.299,2 million. See Table II - 44.

From 55 projects 5 project are foreign capital investment with the investmen value as much as US$ 13.418.200 have realized US% 14.079.700 (105,1%) while 50 projects of domestic capital investment have been realized 43 projects with the realization value of Rp268.179,8 million, and absorb foreign experts as many as 152 persons and Indonesia labour force as many as 11.424 persons.

Tabel / *Table III — 44*

REKAPITULASI PROYEK PMDN/PMA DI PROPINSI MALUKU MENURUT KABUPATEN/DATI II s/d TAHUN 1986

RECAPITULATION OF PROJECTS ON DOMESTIC AND FOREIGN CAPITAL INVESTMENT IN THE PROVINCE OF MOLUCCAS IN ACCORD WITH THE DISTRICTS/MUNICIPALITY TILL THE YEAR 1986

Kabupaten/Kodya *District/Municipality*	PROYEK / *PROJECT*		INVESTASI / *INVESTMENT*		Keterangan.
	PMA *Foreign Capital Invest.*	PMDN *Domestic Capital Invest.*	PMA *Foreign Capital Invest.*	PMDN *Domestic Capital Invest.*	
Kodya Ambon/ *Municipality of Ambon*	–	8	–	43.495,2	PMA: Dalam Ribuan Dollar PMA *(in thousand dollars)*
Kab Maluku Utara/ *District of North Moluccas*	1	22	1.000,0	136.280,4	PMDN: Dalam Jutaan Rupiah PMDN *(in million rupiahs)*
Kab Maluku Tengah/	–	14	–	103.363,5	
Kab Maluku Tengah/	4	2	12.418,2	3.299,2	
Kab Halmahera Tengah/ *District of Central Halmahera*	–	4	–	24.242,8	
	5	50	13.418,2	310.681,1	

adalah Kabupaten Maluku Tengah Rp 200 juta, dan Kotamadya Ambon sebesar Rp 400 juta. Untuk Kabupaten Maluku Tengah dana tersebut digunakan untuk keperluan pasar (Masohi, Namlea dan Saparua) sedangkan untuk Kotamadya Ambon adalah untuk pembangunan pasar baru.

c. Pembinaan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta kewiraswastaan Pedagang Ekonomi Lemah, maka selama Pelita III telah dilaksanakan penataran, konsultasi dan penyuluhan sebagai berikut: (1) Penataran Pedagang Ekonomi Lemah sebanyak 12 kali dengan jumlah peserta sebanyak 335 pengusaha, dan konsultasi terhadap 170 pengusaha; (2) Penataran pengusaha muda sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 170 pengusaha.

Pembinaan Koperasi

Berbagai upaya melalui beberapa kebijaksanaan Pemerintah telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peranan koperasi/KUD sebagai lembaga perekonomian pedesaan. Pada awal Pelita III terdapat 192 buah koperasi di daerah ini, dan pada akhir Pelita III telah meningkat menjadi 302 buah yang berarti meningkat rata-rata 11,99% per tahun. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus koperasi/KUD telah dilakukan pula penataran dan penyuluhan.

d. Perbankan

Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana dari dan untuk masyarakat guna memperlancar kegiatan perekonomian negara (nasional/daerah). Jumlah Bank di daerah ini sampai dengan akhir Pelita III tercatat 21 buah, yang berlokasi di Kotamadya Ambon sebanyak 8 buah; Ternate 5 buah; Tual 2 buah; Masohi dan Soa—Sio masing-masing 1 buah; Sanana 1 buah: Namlea 1 buah; dan Saumlaki 1 buah. Pada awal Pelita III hanya terdapat 15 buah Bank, sedangkan selama Pelita III jumlah Bank bertambah sebanyak 6 buah. Lihat Tabel III-45.

Perkembangan kredit perbankan di daerah Maluku selama Pelita III menunjukkan prosentase yang cukup besar bila dibandingkan dengan keadaan perkreditan selama Pelita II. Jumlah kredit perbankan pada akhir Pelita II adalah sebesar Rp 13.532,22 juta. Jumlah tadi meningkat pada akhir Pelita III menjadi Rp 138.810,24 juta. Ini berarti terjadi kenaikan rata-rata 59,30% setiap tahun.

Jumlah kredit perbankan selama Pelita III diarahkan untuk sektor usaha ekspor sebesar Rp 70.055,06 juta (50,47%); dan sebesar Rp 67.117,54 juta (48,39%) untuk usaha produksi dan sebesar Rp 1.637,64 juta (1,18%) untuk sektor usaha lainnya. Lihat Tabel III-46.

Selain kredit perbankan yang khusus ditujukan bagi pengusaha golongan ekonomi kuat, maka pengusaha yang tergolong ekonomi lemah juga disediakan KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen). Pada tahun pertama Pelita III jumlah plafon kredit yang tersedia untuk KIK dan KMKP masing-masing berjumlah

The export activities for the companies of foreign and domestic capital on the whole is US$ 105.067.167,68 with the volume of 12.330.947,47 kg and 356.414,95 m3, and exported tq 19 countries of destination. The whole export of the province of Moluccas in the year 1986 in as big as US$ 138.872.680. This means 75,66% export of the Moluccas is contributed by the foreign and domestic companies covering the fields of wood industry (Ply wood. sawn timber, veener) giving tye greated contribution is US$ 76.681.621,45 and followed by fishery (fish, shrimps, pearl, inkt-fish, and pearl shell) as big as US$ 26.859.028.

a. The Realization of President Decree No 14A Year 1980

In the efforts to realize the President Decree no 14A year 1980, based on the letter of decision of the government of the province of Moluccas no KPTS/768/GMAL/1980 dated 16 November 1980 a committee of prequalification has been established in the province of Moluccas. The companies belonging to the list of abled counterparts (DRM) for the fiscal years 1981/1982 either involved in the work of contractors, or in the fields of goods supply and service, in accord with the letter of decision of th egovernor of Moluccas no 517/616/1982 dated 7 July 1982 in the whole Moluccas are 562 companies. While the amount of companies belonging to the abled counterparts list of the government year 1982 are 402 companies with the following details.

(1) Companies involved in construction work covering native companies 266 companies, and non-nativ companies as many as 39 companies.
(2) Supplier/providers covering native companies 73 companies and non-native 3 companies.
(3) Electrical installation covering native companies 18 companies and non-native 3 companies.

b. Market Construction

The realization of creating means for enterprise trade and commerce, in the from of construction and restoration of markets and the building up of Inpres markets till the end of Pelita III have been realized as many as 17 new markets and 31 markets restored.

Those markets are scattered all over the capitals of the province, the districts, and the sub-districts. The wide areal totally is 13.805 m2 with the sum of traders accomodated as many as 3.095 enterpreneurs. The amount of expenses having been invested are Rp 750 million.

Based on the letter of decision of the governor of the Moluccas no 581/904/1982 it had been determined the allocation of Inpres funds are the district of Central Moluccas as many as Rp200 million, the municipality of Ambon Rp400 million. For the district purposes (Masohi, Namlea, and Saparua) while for the municipality of Ambon is for the construction of a new market

c. Promoting of Puny Economic Group

To enhance the knowledge and the skill and the entrepreneurship of the puny economic group, during Pelita III an upgrading course has been conducted, consultations and information and guidance have been held as follows :

(1) Upgrading course for puny economics entrepreneurs as many as 12 times with the total participants 335 entrepreneurs, and consultation to 170 entrepreneurs;
(2) Upgrading of young enterpreneurs as many as 3 times with total atendants of 170 entrepreneurs.

Promoting of Cooperatives

Various efforts sustained by several government's policies have been carried out to promote the role of the cooperative / KUD or the Rural Cooperatives Unit as the rural economic institution. At the beginning of Pelita III there are 192 cooperatives in this region, and at the end of Pelita III increase into 302 cooperatives or the average of 11,99% per year. In the attempts to enhance the knowledge and skill of the cooperatives board / rural cooperatives unit, upgrading course and guiding and information have been conducted.

d. Banking System

The institution of banking is playing a significant role in collecting and distributing funds from and for the society to run smoothly the flow of economic activities (national/regional). The sum of banks in this region till the end of Pelita III is noted to be 21 banks, located in the municipality of Ambon as many as 8 banks; Ternate 5 banks; Tual 2 banks ; Masohi and Soasiu each one bank ; Sanana one bank, Namlea one bank; and Saumlaki one bank. At the beginning of Pelita III only 15 banks are found, while during Pelita III the amount of banks increases as many as 6 banks.

The development of credits of banks in the regions of Moluccas during Pelita III show a percentage of great significance if compared to the credits during Pelita II. The amount of banking credits at the end of Pelita II is as much as Rp13.532,22 million. This sum increase at the end of Pelita III into Rp138.810,24 million. This means there is an increase average of 59,30% every year. *See Table III — 45*

Tabel / *Table III — 45*

PENYEBARAN LOKASI DAN JENIS BANK DI DAERAH MALUKU SAMPAI DENGAN AKHIR PELITA III DI MALUKU
DISTRIBUTION OF LOCATIONS AND TYPES OF BANK IN THE MOLUCCAS TILL THE END OF PELITA III IN THE MOLUCCAS

No Lokasi *Location*	Nama Bank *Name of bank*	Keterangan *Note*
(1) (2)	(3)	(4)
1. Kotamadya Ambon/	1. Bank Indonesia	Kantor Cabang/*Branch office*
	2. B R I	Kantor Cabang/*Branch office*
	3. Bank Exim Ind	Kantor Cabang/*Branch office*
	4. B N I 1946	Kantor Cabang/*Branch office*
	5. B P I	Kantor Cabang/*Branch office*
	6. B P D Maluku	Kantor Pusat/*Head office*
	7. B D N	Kantor Cabang/*Branch office*
	8. Bank Bumi Daya	Kantor Cabang/*Branch office*
2. T e r n a t e	1 Bank Indonesia	Kantor Cabang/*Branch Office*
	2 B R I	Kantor Cabang/*Branch office*
	3. Bank Exim Ind.	Kantor Cabang/*Branch office*
	4. B N I 1946	Kantor Cabang/*Branch office*
	5. B D N .	Kantor Cabang/*Branch office*
3. T u a l	1 B R I	Kantor Cabang/*Branch office*
	2. B P D Maluku	Kantor Cabang/*Branch office*
4. M a s o h i	B R I	Kantor Cabang/*Branch office*
5. S o a - S i o	B R I	Kantor Cabang/*Branch office*
6. T o b e l o	B N I 1946	Kantor Cabang/*Branch office*
7. N a m l e a	B P D Maluku	Kantor Cabang/*Branch office*
8. S a n a n a	B P D Maluku	Kantor Cabang/*Branch office*
9. S a u m l a k i	B P D Maluku	Kantor Cabang/*Branch office*

Sumber : Bank Indonesia Cabang Ambon Mulai beroperasi pada Pelita III.
Source : Bank Indonesia, Ambon Branch. Beginning in operation in Pelita III

1,0 milyar rupiah dan 0,8 milyar rupiah, dan pada akhir tahun Pelita III telah meningkat masing-masing sebesar 7,8 milyar rupiah dan 9,3 milyar rupiah.

Untuk baki deber pada tahun pertama Pelita III masing-masing sebesar 373,6 juta rupiah, dan pada akhir Pelita III meningkat menjadi masing-masing sebesar 3,8 milyar rupiah dan 4,3 milyar rupiah. Demikian halnya jumlah nasabah pada awal Pelita III baru berjumlah 2.573 orang dengan perincian 420 orang nasabah KIK dan 2.153 orang nasabah KMKP, dan pada akhir Pelita III telah meningkat menjadi 9.613 orang dengan perincian 1.789 orang nasabah KIK dan 7.824 orang nasabah KMKP.

Dengan demikian selama pelaksanaan Pelita III jumlah plafon kredit meningkat sebanyak 75,56% per tahun dan KIK sebesar 67,11% per tahun, sedangkan KMKP sebesar 84,65% per tahun. Baki debet meningkat masing-masing sebesar 78,58% per tahun untuk KIK sedangkan KMKP sebesar 88,29% per tahun. Untuk nasabah masing-masing meningkat sebesar 43,66% dan 38,07% setahun. Lihat Tabel III-47.

Perkembangan Pengerahan Dana Perbankan

Dalam upaya pemenuhan keperluan akan dana untuk pelaksanaan kreditnya, maka salah satu sumber usaha keuangan perbankan adalah pengerahan dana masyarakat. Selama Pelita III pengerahan dana perbankan telah menunjukkan perkembangan yang sangat memuaskan dari tahun ke tahun.

The amount of banking credits during Pelita III its directed to the export sector enterprise as much as Rp70.055,06 million (50,27%); for the purpose of production as big as Rp67.117,54 million (48,39%); and as big as Rp1.637,64 million (1,18%) for other sectors. See Table III–46

Tabel / *Table III — 46*

PERKEMBANGAN KREDIT PERBANKAN SELAMA PELITA III DI MALUKU, DIPERINCI MENURUT SEKTOR USAHA
DEVELOPMENT OF BANKING CREDITS DURING PELITA III IN THE MOLUCCAS, IN DETAILS ACCORDING TO THE ENTERPRISE SECTORS

(Dalam Jutaan Rupiah) / ***In million rupiahs***

No Sektor Usaha *Enterprise sector*	PELITA III					
	1979	1980	1981	1982	1983	%
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Produksi/ *Production*	2.619,50	3.341,86	8.094,25	28.753,17	67.117,54	48,35
2. Export/*Export*	6.398,33	15.684,74	30.479,82	49.390,03	70.055,06	50,47
3. Lainnya/ *Other sectors*	4.926,66	2.451,31	682,30	896,77	1.037,64	1,18

Sumber : Bank Indonesia Cabang Ambon dan Ternate Sampai dengan Nopember 1983
Source : Bank Indonesia, Ambon and Ternate Branch. Till November 1983.

Excep banking credit especially destined for the obled economic group, the puny economic entrepreneurs are also being supplied with KIK (small investment credit) and KMKP (permanent working capital credits). In the first year Pelita III the amount of credits floor being in supply for the small investment credits and the permanent working capital investment, respectively Rp1,0 billion and Rp0,8 billion, and at the end of Pelita III has increased eac as big as Rp7,8 billion and Rp9,3 billion.

For the portion of debet in the first year of Repelita each comprising Rp373,6 million, and at the end of Pelita III increase to Rp3,8 billion, and Rp4,3 billion. The same case is it with the number of customers at the beginning of Pelita III has the sum of 2.573 persons with the details 420 persons the customers of small investment credit and 2.153 persons customers for permanent working capital credits, and at the end of Pelita III has increased to 9.613 persons with the details 1.789 persons for customers of small investment credits, and 7.824 persons as permanent working capital investment credit.

Doing so as long as the implementation of Pelita III the sum of credit floor increases into 75,56 per year, KIK or small investment credit as much as 67,11% per year, while the KMKP permanent working capital credit as much as 84,65% per year.

For the debet increase each as much as 78,58% per year for small investment credit, while for the permanent working capital credit as much as 88,29% per year.

For the customers each increases as much as 43,66% and 38,07% per year. See Table III–47

Development of Banking Funds Raising

In the attempts to fulfill the needs of funds to cary out the credits, therefore one the sources in the financ'al bnking enterprise is to raise funds from the

Tabel / *Table III — 47*

PERKEMBANGAN KIK DAN KMKP SELAMA PELITA III DI MALUKU (KUMULATIF)
DEVELOPMENT OF SMALL INVESTMENT CREDIT AND PERMANENT WORKING CAPITAL CREDIT PELITA III IN THE MOLUCCAS (ACCUMULATIVE)

Tahun	Plafon / *Floor*			Baki Debet / *Debet portion*			Nasabah / *Customer*		
	KIK	KMKP	Jumlah *Total*	KIK	KMKP	Jumlah *Total*	KIK	KMKP	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1979	1.028,50	832,65	1.861,15	342,08	715,68	420	2.153	2.573	
1980	1.589,91	1.576,44	3.166,35	687,31	810,38	1.497,69	545	3.181	3.726
1981	3.514,86	3.384,19	6.899,05	1.971,45	1.714,16	3.685,61	851	5.145	5.896
1982	6.847,87	7.624,66	14.472,53	3.908,83	4.324,46	8.133,29	1.632	7.270	8.902
1983	7.792,17	9.281,70	17.073,87	3.803,27	4.316,43	8.119,70	1.789	7.824	9.613

Sumber : Bank Indonesia Cabang Ambon dan Ternate Sampai dengan Nopember 1983.
Source : Bank Indonesi, Ambon and Ternate Branch. till November 1983.

Secara keseluruhan jumlah pengerahan dana selama Pelita III meningkat dengan 34,19% per tahun yaitu meningkat dari 10,48 milyar rupiah dalam tahun 1979 menjadi 33,98 milyar rupiah dalam tahun 1983. Sumbangan terbesar adalah pada kegiatan Giro yang pada awal Pelita III berjumlah 6,64 milyar rupiah atau 63,33% dari seluruh pengerahan dana. Pada akhir Pelita III meningkat menjadi 20,46 milyar rupiah dan merupakan peningkatan sebesar 60,23% dari seluruh pengerahan dana.

Deposito sebagai salah satu komponen dari pengerahan dana perbankan, selama Pelita III telah meningkat dengan 55,28% per tahun. Sumbangan terhadap pengerahan dana secara keseluruhan adalah sebesar 11,39% pada awal Pelita III meningkat menjadi 20,42% pada tahun terakhir Pelita III. Selain Giro dan Depositi maka tabungan juga merupakan komponen pengerahan dana yang mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun selama pelaksanaan Pelita III.

Pada awal tahun Pelita III jumlah tabungan sebesar 2,6 milyar rupiah, pada akhir Pelita III meningkat menjadi 6,6 milyar rupiah yang berarti terjadi peningkatan sebesar 25,52% per tahun. Sedangkan sumbangannya terhadap pengerahan dana perbankan masing-masing sebesar 25,28% pada awal tahun Pelita III dan 19,35% pada akhir Pelita III. Lihat Tabel III-48.

society. During Pelita III the banking funds raising shows great development of satisfactory prospect from year to year.

On the whole the amount of funds raised during Pelita III increase with 34,19% per year, namely increasing from 10,48 billion rupiahs in the year 1979 becoming 33,98 billion rupiahs in the year 1983. The greatest contribution is in the giro activities which is in the beginning of Pelita III yielding the amount of 63,64 billion rupiahs or 63,33% of the aggregate banking funds raising. At the end of Pelita III increase with 20,46 billion rupiahs and becomes 60,23% of the aggregate funds raising.

The deposits as one of the components of the banking funds raising, during Pelita III has increased with 55,28% per year. The contribution to the aggregate funds raising is 11,39% at the beginnig of Pelita III which increase into 20,42% in the last year of Pelita III. Besides the giro and deposits also the savings become the components of funds raising that undergo increase of great significance from year to year during the implementation of Pelita III.

At the beginning of Pelita III the amount of savings is 2,6 billion rupiahs, at the end of Pelita III increase into 6,6 billion rupiahs, which means there is an increase of 25,52% per year. Meanwhile the contribution to the banking funds raising increase respectively 25,28% at the beginning of Pelita III and 19,35% at the end of Pelita III. See Table III–48.

Tabel / *Table III — 48*

PERKEMBANGAN PENGERAHAN DANA PERBANKAN SELAMA PELITA III DI MALUKU (KUMULATIF)
THE DEVELOPMENT OF BANKING FUNDS RAISING DURING PELITA III IN MOLUCCAS (ACCUMULATIVE)

(dalam jutaan rupiah) / *(In rupiah millions)*

No.	Jenis Pengeluaran Dana / *Types of Funds Raising*	1979		1980		1981		1982		1983	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Giro / *Giro*	6.636,77	63,33	17.096,84	76,16	22.664,86	75,66	23.153,22	74,68	20.463,13	60,23
2.	Deposito / *Deposits*	1.193,41	11,39	1.567,97	6,98	1.853,89	6,19	1.854,97	5,98	6.938,80	20,42
3.	Tabungan / *Savings*	2.649,07	25,28	3.784,96	16,86	5.438 66	18,15	5.994,73	19,34	6.575,90	19,35

Sumber : Bank Indonesia Cabang Ambon dan Ternate sampai dengan bulan Nopember 1983.
Source : Bank Indonesia, Ambon and Ternate Branch. Up till November 1983.

10. Koperasi

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku, koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD) perlu diberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya agar benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan sehingga dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi serta salah satu wadah utama untuk membina kemampuan golongan ekonomi lemah.

Usaha-usaha yang telah dilakukan meliputi pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi yang merupakan program pokok disamping program pendidikan, penerangan, penyuluhan, dan bimbingan, penyempurnaan organisasi dan manajemen, bantuan permodalan atas jaminan kredit koperasi (LJKK) serta berbagai fasilitas lainnya.

Pada akhir Pelita II jumlah koperasi sebanyak 165 buah. Akhir Pelita III jumlahnya meningkat menjadi 302 buah. Dengan demikian selama lima tahun Pelita III pertambahan jumlah koperasi sebanyak 137 buah atau bertambah sebanyak 83%. Rata-rata pertambahan ini sebesar 27 buah per tahun atau 12,85%.

Angka kenaikan ini memberikan petunjuk bahwa selama Pelita III perkembangan koperasi baik sekali, disebabkan tumbuhnya KUD—KUD baru dan peralihan status sebagian dari koperasi murni/biasa ke KUD.

Dari sejumlah 302 kopersi, KUD ada sebanyak 120 buah dan sisanya berupa koperasi biasa sebanyak 182 buah yang terdiri dari koperasi primer 166 buah dan koperasi pusat sebuah dan gabungan 1 (satu) buah.

Perkembangan koperasi ini juga dapat dilihat dari segi keanggotaannya. Pada akhir Pelita II anggota koperasi sebanyak 12.564 orang sedangkan pada akhir Pelita III menjadi 34.611 orang. Berarti sampai akhir Pelita III terjadi peningkatan anggota sebanyak 175,48% atau kenaikan rata-rata 22,47% setahun. Suatu angka prosentase yang menunjukkan kepercayaan Maluku terhadap koperasi mulai timbul dan mendapat perhatian yang besar.

Mengenai simpanan koperasi pada akhir Pelita II berjumlah Rp 86,1 juta dan pada akhir Pelita III mencapai Rp 405,9 juta, berarti selama Pelita III terjadi peningkatan jumlah simpanan sebesar Rp 319,8 juta

10. Cooperatives

The basic Design of Molucca Regional Development States that cooperatives in general, rural cooperatives in particular, be given the opportunity to take up the assigned tasks in development and become one the vehicles to promote puny enterpreneurs.

The efforts takenthus far include the promotion of cooperative institutions and the development of cooperative business undertakings beside programmes for education, information, field instruction, improvement of organization and management, capital accummulation guaranteed by credit insurance, and various other facilities.

The number of cooperatives rose from 165 units at the end of Pelita III, making an annual average increase of 27 units or 12.85%.

The increase indicates that cooperatives have flourished during Pelita III, mainly due to the fast-growing number of rural cooperatives. Out of the total 302 units of cooperatives, at the end of Pelita III, 182 were primary cooperatives, central cooperative and joint cooperative while 120 units were rural cooperatives.

The number of members also indicates the growth of cooperatives. It rose from 12,594 member at the end of Pelita II to 34,611 member at the end of Pelita III, making a total increase of 175.48% or annual growth or 22.47%. This percentage reflects the Moluccas' trust and attention toward cooperatives begin to emerge.

Cooperative savings at the end of Pelita II amounted to Rp 86.1 millions while at the end of Rp 319.8 millions or 370,37%, overaging Rp 63.96 million or 96,36% annually.

The development of reserve cooperative at the end of Pelita II amounted to Rp 82.7 millions and the end of Pelita III became Rp 291.9 millions, making a total increase of 209,2 millions or 252,96% to compare with the account at the end of Pelita II. the average increase of capital reserve development annually during Pelita III was Rp 41.84 millions or 28.69%.

The volume of cooperative activities at the end of Pelita II amounted to Rp 1,547.5 millions while at the end of Pelita III it increased to Rp 42,770.7 millions. This means that during Pelita III it increased by Rp41,232.2 millions or 2.663,86%, or an annual overage of Rp 8,244,6 million or 94.22%.

atau meningkat 370,37% atau kenaikan rata-rata sebesar Rp 63,96 juta per tahun atau rata-rata 36,36% per tahun selama Pelita III.

Mengenai perkembangan modal cadangan koperasi pada akhir Pelita II berjumlah Rp 82,7 juta dan pada akhir Pelita III sebesar Rp 291,9 juta berarti selama Pelita III telah terjadi penambahan modal cadangan sebesar Rp 209,2 juta atau 252,96% dibanding pada akhir Pelita II. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan modal cadangan per tahun Pelita III adalah sebesar Rp 41,84 juta atau 28,69%.

Adapun perkembangan volume usaha koperasi pada akhir Pelita II sebesar Rp 1.547,5 juta sedangkan pada akhir Pelita II naik menjadi Rp 42.770,7 juta. Ini berarti selama Pelita III terjadi penambahan sebanyak Rp 41.232,2 juta atau 2.663,86%. Atau rata-rata penambahan per tahun selama Pelita III sebesar Rp 8.244,6 juta atau 94,22%.

Tingginya nilai prosentase modal cadangan dan volume usaha di daerah ini dibebankan, bantuan Bank Dunia terhadap 8 buah KPL/KUD Mina berupa 10 buah kapal motor penangkap ikan cakalang dengan nilai Rp 348.985.684,-. Bantuan ini direalisir secara bertahap sejak tahun 1978 dengan 7 buah jaring buki sebesar Rp 46.206.746,-.

Bantuan juga diterima dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemberian kredit kepada koperasi/KUD di bidang tata niaga cengkeh dan di bidang pangan atau pengeringan padi (Rice Mill Unit/RMU), khususnya bagi koperasi/KUD Transmigrasi di Kairatu.

Mengenai perkembangan realisasi kredit koperasi atas jaminan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) selama Pelita III adalah sbb.: Pada tahun 1979 realisasi kredit sebesar Rp 312,6 juta dan pada tahun 1980 meningkat menjadi Rp 920,5 juta atau meningkat sebesar 194,47%. Kenaikan kredit ini sebagai akibat dari sisa realisasi bantuan Bank Dunia berupa 5 (lima) buah kapal motor cakalang bernilai Rp 673,4 juta. Selain itu pada musim cengkeh tahun 1980 terdapat 8 (delapan) buah koperasi/KUD mendapat kredit sebesar Rp 247,00 juta untuk akumulasi cengkeh.

Tahun 1981 realisasi kredit sebesar Rp 1.004,1 juta atau naik sebesar 9,08% dibandingkan dengan tahun 1980. Pada tahun 1982 jumlah kredit hanya Rp 399,8 juta yang ditunjukkan khusus untuk akumulasi cengkeh. Dan sampai dengan tahun terakhir Pelita III, dari 302 buah koperasi di Maluku yang mendapat kredit atas jaminan LJKK sebanyak 146 buah koperasi atau sebesar 51,65%. Lihat Tabel III-49 dan III-50.

The high percentage growth of capital reserve and volume of activity in this region was caused by world Bank's also for 8 KPL/KUD Mina in the form of 10 tuna - fish catching ships with the value of Rp 348,985,684.-. This aid had been gradually realized since 1978 with 7 buki-net eatcher with the value of Rp 46,206,746.

Aid were also received from the Central Government and Provincial Administration in form of credits for cooperative/KUDS for clove trade regulation and food or rice-drying (Rice Mill Unit/RMU), especially for transmigration cooperative/KUD at Kairatu.

The development of cooperative credit under guarantee of the Institute of Cooperative Credit Guarantee (LJKK) during Pelita III were as follows : In 1979 realization amounted to Rp 312.6 millions and in 1980 increased to be come Rp 920.5 millions or an increase by 194,47%. This increase was caused by the rest of World Bank's aid realization in form or 5 tuna-fish catching ships with the value of Rp 673.4 millions. Beside, at the clove season in 1980 there were 8 cooperatives/KUD which received credits amounting to Rp 247.00 millions for clove accumulation.

Credit realization in 1981 amounted to Rp 1,004.1 millions or an increase by 9,08% to compare with that of 1980. In 1982 the total credit was only Rp 399.8 millions for the special purpose of clove accumulation. And until the last year of Pelita III there were only 146 cooperatives in Moluccas which received credit under the guarantee of Institute of Cooperative Credit Guarantee (Credit Insurance-LJKK) from the total of 302 bodies, or only about 51,65%.

During Pelita III cooperative cadres were trained in various skills so that they can be able to manage and deal with cooperative problems such as management, auditing, supervision, management of sub-district cooperatives, management, accounting, cooperative's credit, statistics etc. The courses enrolled 1.766 trainees from all cooperatives in the Molucca Province.

Clove trade based on Keppres No. 8 of 1980 was accomplished at the beginning of 1981/1982. In this year the amount of cooperatives involved in clove trade were 39 units with credit plafond amounting to Rp 2,340 millions. Credit realization in fact amounted to Rp 10,781 millions for clove auction of 1,466,967 kg with the value of Rp 11,003.52 millions. From that realization, the repayment amounted to Rp 10,730.93 millions, thus leaving Rp50.73 millions in arear. See Tables III – 49 and III – 50

Tabel / *Table III — 49*

PERKEMBANGAN KOPERASI DAN INDIKATORNYA SELAMA PELITA III DI MALUKU

DEVELOPMENT OF COOPERATIVES AND INDICATORS DURING PELITA III IN THE MOLUCCA

Uraian / *Legend*	Satuan / *Unit*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Koperasi/ *Number of Cooperatives*	buah	165	189	232	299	251	302
Anggota/*Members*	Orang	12.564	12.792	16.030	20.307	23.375	34.611
Simpanan/*Savings*	Rp	86.137,2	132.322,4	178.103,3	215.433,1	304.656,6	405.864
Cadangan/*Reserves*	Rp	82.668,6	101.288,4	122.222,1	158.748,1	176.224,2	291.857
Volume Usaha/ *Business volume*	Rp	1.547.537,6	2.084.421,8	5.178.204,2	8.640.063,4	10.514.444,5	42.770.730
Dana-Dana/Funds	Rp	5.769,7	10.428,9	5.188,7	23.787,1	47.044,9	78.330,2
Hutang/*Debt*	Rp	272.465,6	341.621,3	687.224,8	1.008.669,9	1.961.137,7	1.332.786,6
Piutang/*Account receivable*	Rp	170.548,6	180.816,2	184.944,4	220.865,1	548.865,1	417.321,8
Sisa Hasil Usaha/*Profit*	Rp	56.270,9	11.485,7	76.388,6	100.916,3	192.286,2	453.690,4
Fasilitas Kredit/ *Credit facilities* KUD/Koperasi/*for KUD Cooperatives*							
a Investasi/*Investation*							
Jaminan Kredit/ *Credit insurance*	Rp	11.395,0	147.976,5	673.401,4	727.896,4	–	80.000,0
Jaminan Pemerintah/ Depkeu/*Government Financial Ministry Guarantee*	Rp	–	–	–	–	–	–
b Eksploitasi/ *Exploitation*							
Jaminan Kredit/ *Credit insurance*	Rp	130.900,0	164.640,0	247.050,0	276.250,0	399.750,0	549.090,0
Jaminan Pemerintah /Depkeu/*Government Financial Ministry Guarantee*	–	–	–	–	–	–	–

Mengenai kader koperasi yang dididik dalam berbagai macam ketrampilan selama Pelita III cara-cara pembinaan/mengurus koperasi, pemeriksaan koperasi, pengawasan, petugas koperasi kecamatan, tata laksana, akuntansi koperasi, perkreditan, statistik dan lain-lain telah diikuti oleh sebanyak 1.766 orang dari seluruh koperasi yang ada di Maluku. Lihat Tabel III-50.

Tabel / *Table III — 50*

PENDIDIKAN KADER KOPERASI/KUD SELAMA PELITA III DI MALUKU
TRAINING OF COOPERATIVE CADRES DURING PELITA III IN THE MOLUCCA

Tahun *Year*	Jumlah Total Kader 1979-1983 *Cadres Total Number*	Pertambahan Jumlah Kader Tiap Tahun *Yearli Addition or Cadres*	Jenis Pendidikan *Kind of Training*
(1)	(2)	(3)	(4)
1979	896	—	
1980	956	60	- Pengurus Koperasi/KUD dan Badan Pemeriksa *Board of Management and Audit Board.*
1981	1.336	380	- Pengurus Koperasi/KUD dan Manager/*Board of Management and Manager*
1982	1.603	267	- Pengawas dan Pembina Koperasi/KUD/*Supervisor of Cooperative/KUD Advisers.* - Petugas Koperasi Kecamatan/*Sub-district Cooperative Staff.* - Pengawas/*Supervisor* - Tata Laksana dan Statistik/*Management and Statistics.*
1983	1.766	163	- Akuntansi Koperasi/*Cooperative Accounting* - Perkreditan dan Bidang Usaha/*Credit and Fields of Activities.*

Khusus pelaksanaan tataniaga cengkeh diatur dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1980 mulai dilaksanakan pada tahun 1981/1982. Pada tahun ini jumlah koperasi yang menangani tataniaga cengkeh berjumlah 39 buah dengan plafond kredit sebesar 2.290,5 juta. Ternyata jumlah kredit yang direalisir sebesar Rp 10.781,66 juta untuk pelelangan cengkeh sebanyak 1.466.967 Kg dengan nilai Rp 11.003,52 juta. Dari realisasi kredit tersebut pembayaran kembali sebesar Rp 10.730,93 juta sehingga sisa kredit Rp 50,73 juta.

Pada tahun anggaran 1983/1984 jumlah koperasi yang menangani tataniaga cengkeh berjumlah 38 buah dengan plafond kredit sebesar Rp 2.340 juta. Sedangkan realisasi kredit yang dicapai adalah sebesar 16.387,12 juta untuk melelangkan cengkeh sebanyak 2.616.151 Kg dengan nilai Rp 15.970,32 juta. Kredit yang belum dikembalikan pada akhir Pelita III adalah sebanyak Rp 405,94 juta. Lihat Tabel III-51.

Dari kemajuan-kemajuan tadi maka pelaksanaan tataniaga cengkeh telah menghasilkan dana finalty cengkeh yang cukup besar. Berdasarkan persetujuan Pemerintah tingkat pusat, dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembangunan prasarana fisik berupa pembangunan 71 buah gedung KUD/Koperasi termasuk 4 (empat) buah PUSKUD/Perwakilan PUSKUD lengkap dengan peralatannya yang menghabiskan dana sebesar Rp 2.819,47 juta. Disamping itu telah diberikan kredit dalam bentuk **alat pengeringan cengkeh** (mecanical drayer) sebanyak 42 buah seharga Rp 319,97 juta kepada 95 buah KUD/Koperasi.

11. Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Dati I Maluku ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja melalui peningkatan prasarana dan sarana latihan kejuruan terutama melalui Balai Latihan Kejuruan Industri dan Pertanian (BLKIP), Politeknik serta Mobile Training Unit yang sesuai dengan keperluan pembangunan; Penataan dan penyempurnaan sistem pengupahan disamping itu juga memperhatikan produksi dan produktivitas tenaga kerja dengan usaha meningkatkan kesejahteraan dan daya beli golongan penerima upah yang rendah.

Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin maka pada tahun 1971 penduduk Maluku terdiri dari 50,74% laki-laki dan 49,26%

Jenis Pendidikan/kind of Training : "Pengurus Koperasi/KUD dan Badan Pemeriksa/Board of Management and Manager. "Pengawas dan Pembina Koperasi/KUD/Supervisor of Cooperative/KUD Advisers. "Petugas Koperasi Kecamatan/Sub district Cooperative Staff. "Pengawas/Supervisor. "Tatalaksana dan Statistik/Management and Statistics."Akutansi Koperasi/Cooperative Accounting. "Perkreditan dan Bidang Usaha/Credit and Fields of Activities.

In the 1983/1984 budgetary year, 38 cooperatives were involved in clove trade with credit plafont amounting to Rp 2,340 millions. Credit realization reached Rp 16,387,12 millions for the auction of 2,616.151 Kg of clove with the value of Rp 15,870.38 millions. Credit in arear to the end of Pelita III were Rp 405.94 millions.

Tabel / *Table III — 51*

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TATANIAGA CENGKEH SELAMA PELITA III DI DATI I MALUKU
DEVELOPMENT OF CLOVE TRADE MANAGEMENT DURING PELITA III IN THE MOLUCCA

Uraian *Legend*	Jenis *Kind*	1981/1982	1982/1983	1983/1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jenis Koperasi/*Kinds of Cooperative*	buah	39	36	38
Plafond Kredit/*Credit Plafond*	Rp	2.290.500.000,	2.233.000.000,	2.340.000.000
Pengembalian/*Repayment*	Rp	10.781.663.890,	12.068.866.529,	16.387.116.008
Pembayaran Kembali/*Paying Back*	Rp	10.730.926.839,	11.806.944.337,	15.981.178.757
Sisa Kredit/*Credit Remainder*	Rp	50.737.051,	261.922.192,	405.937.251,
Pelelangan/*Action*				
a Kilogram/*Kilogram*	Kg	1.466.967	1.545.218,7	2.616.151
b Nilai/*Value*	Rp	11.003.517.115,	12.104.321.959	15.970.319.222

From the above mentioned achivement it is clear that a large a large enough amount of clove fund had been achieved, accumulated from the realization of clove trade management. According to the Central Government agreement, the accumulated fund was used to develop the physical facilities of buildings of 71 KUD/Cooperatives including 4 PUSKUD/representative offices complete with equipments costing totally Rp 2,819.47 millions. Besides, 95 KUD/Cooperatives also received credit in form of clove mechanical dryers (totally 42 units) with a value of Rp 319.97 millions.

Work Force

The development of work force condition in the Province of Molucca has been pointing towards the improvement of work force quality and protection of its condition by improving its infrastructures and facilities of vocational trainings, especially in the Hall of Industrial Vocational Training (BLKIP), Polytechniques and Mobile Training Units, in conform with the need of development, managing and improving the salary and wage systems, and also supervising the production and productivity or the work force with efforts to increase the prosperity and buying force of those who were in the lower wage bracket.

By sex, Molucca population consist of 50.74% male and 49.26% female. With the assumption that people's productive age are in their 20 - 59 years, we can say that in 1971, some 39.09% were in their productive age, which increased to 40.97% in 1980. They were bearing the burden of those who were not in the productive age category.

The age structure of the population pointed out that the greater part of those in the work force category who were in work were those in the age group between 15 — 54 yeears, and the 1971 condition happened to be the same with 1980's. Those among the work force who were still unemployed mostly among 15 — 34 years age group.

Seen from the sex factor and activities among those who there 10 years old and older, the outline can be drawn as follows : Work force among male totally 225,688 in 1971, employment amounted to 192,755 while unemployment numbered 42,276. In 1980 the work force condition in Moluccas for male people increased to 278,539, employment reached 275,159 and 3.380 unemployed.

Female work force in 1971 totallte 106,316, employment amounted to 76.272 and unemployed 41.695. This condition increased in 1980 to 125,305 total work force, 122,670 employed, 2,635 unemployed.

Non-work force among the people (pupils and students, housewives etc) in 1971 were 135,275, which then increase in 1980. Theoverall picture for

perempuan. Dan apabila digunakan assumsi bahwa usia produktif penduduk adalah umur 20 - 59 tahun, dapat dikatakan tahun 1971 terdapat 39,09% penduduk usia produktif, yang kemudian meningkat menjadi 40,97% pada tahun 1980. Penduduk dalam kelompok ini menanggung beban terhadap kelompok penduduk pada usia di luar usia

Keadaan struktur umur penduduk tersebut menunjukkan sebagian besar angkatan kerja yang bekerja adalah kelompok usia 15 - 54 tahun, dan keadaan ini di tahun 1971 dan 1980 adalah sama. Sedangkan angkatan kerja yang mencari pekerjaan paling banyak terdapat pada kelompok umur 15 - 34 tahun.

Dilihat dari penduduk berumur 10 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut: Jumlah angkatan kerja laki-laki pada tahun 1971 sebanyak 225.688 orang dan yang bekerja ada sebanyak 192.755, sedangkan yang mencari pekerjaan sebanyak 42.276 orang. Pada tahun 1980 keadaan angkatan kerja di Maluku untuk laki-laki meningkat menjadi 278.539 orang, dan yang bekerja mencapai 275.159 orang, sedangkan tergolong dalam mencari pekerjaan sebanyak 3.380 orang.

Angkatan kerja perempuan pada tahun 1971 berjumlah 106.316 orang, dan yang bekerja sebanyak 76.272 orang. Sedangkan yang mencari pekerjaan 41.695 orang. Keadaan ini meningkat pada tahun 1980 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 125.305 orang, yang bekerja ada 122.670 orang, sedangkan yang tergolong mencari pekerjaan hanya 2.635 orang.

Disamping itu yang tergolong bukan angkatan kerja (anak sekolah, yang mengurus rumah tangga dan lain-lain) pada tahun 1971 berjumlah 135.275 orang, kemudian meningkat pada tahun 1980 menjadi 208.955 (laki-laki). Adapun untuk perempuan yang bukan angkatan kerja pada tahun 1971 berjumlah 244.574 orang dan meningkat pada tahun 1980 menjadi 348.700 orang. Gambaran mengenai penduduk berumur 10 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin pada tahun 1971 dan 1980 dapat disimak tabel berikut. Lihat Tabel III-52.

those of 10 years old and above can be drawn from the Table III – 52

Tabel / Table III – 52

The participation rate of the work force (TPAK) in 1971 consisted of 61.3% male which decreased to 45.3% in 1980. For female, the TPAK in 1971 was 29.2% down to 26.6% in 1980. In general, the TPAK showed a decreasing tendency inthe 10 years period (1971-1980) from 45.3% (1971) to 42.2% (1980). From the age structure condition, the highest TPAK in 1971 was among 35-44 years age amoung (88.25%) while in 1980 this group also topped the list with TPAK score of 64.7%.

The pattern of employment opportunity in Molucca in 1971 showed that more than half of the people in work (73.99%) were engaged in the agricultural sector, 9.82% in other sector, 8.87% in the service sector while the rest divided among sectors of mining, industry, construction, trade, transportation and financial mattes.

In 1980 the structure changed to 71.18 in agriculture, 15.32% in service sector, 5.31% in trade sector, while the rest spreading to the other sectors.

The 1980 condition cited that the greater number of Moluccan forece worked in self-employed activity (29.55%), under irregular term of employment (30.66%), as unpaid family labourer (20.02%) while the rest consitts of those in supported regular labourers.
See Table III – 53.

Seen from the types of employment, the greater part of those in work were as farming workers (54.81%), production labourers 10.87% othe rkins of labour 7.79% and the rest working as professional experts, managers and leaders, administration, sales/market force and vocational services.

The composition of employment in 1980 changed to 58.90% in agriculture, 18.08% in production work and 9.31% in sales/marketing activity. See Table III – 54

Tabel / *Table III — 52*

PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT
JENIS KEGIATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1971 - 1980
POPULATION 10 YEARS OLD ABOVE ACTIVITIES AND SEX DIFFERENCES
1971 - 1980

Jenis Kegiatan *Type Activity*	Laki-laki *Male*		Perempuan *Female*		Laki-laki + Perempuan *Male + Female*	
	1971	1980	1971	1980	1971	1980
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja/ *Work Force*	225.688	278.539	106.316	125.305	332.004	403.844
- Bekerja/*Employed*	192.755	275.159	76.272	122.670	269.027	397.829
- Mencari Pekerjaan/ *Unemployed*	42.276	3.380	41.695	2.635	83.971	6.015
Bukan Angkatan Kerja/ *Non-Work force*	135.275	208.955	244.574	348.700	370.849	557.655
- Sekolah/ *Pupils Students*	85.082	118.197	61.819	89.465	146.901	207.662
- Mengurus Rumah Tangga/*Housewives*	12.534	13.665	148.259	177.218	160.793	190.903
- Penerima Pendapatan/ *Housewives*	3.790	–	1.800	–	5.590	–
- Lain-lain/*Other*	33.860	77.073	32.696	82.017	66.565	159.090
Tak Terjawab/*Unanswered*	7.055	–	13.535	20	20.590	20
J u m l a h / *Total*	368.018	974.988	364.425	948.030	732.443	1.923.018

Sumber : BPS 1980 SERI - S No 27, BPS 1971 SERI E No 25
Source : BPS Seri S No 27 Central Bureau of Statistics

Keadaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 1971 terdiri dari laki-laki 61,3% dan turun menjadi 45,3% untuk tahun 1980. Sedangkan TPAK perempuan untuk tahun 1971 adalah 29,2% dan turun menjadi 26,6% pada tahun 1980. TPAK secara keseluruhan juga menunjukkan penurunan pada periode 10 tahun (1971 - 1980) yaitu dari 45,3% (1971) menjadi 42,2% (1980). Dari segi struktur umur maka pada tahun 1971 TPAK tertinggi adalah pada kelompok umur 35 - 44 tahun (88,2%) dan untuk tahun 1980 kelompok umur ini menunjukkan TPAK tertinggi yaitu 64,7%.

Sedangkan pola kesempatan kerja di Maluku pada tahun 1971 menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk yang bekerja (73,99%) berada pada sektor pertanian, selanjutnya 9,82% bekerja pada sektor lain-lain, 8,87% pada sektor jasa dan sisanya tersebar pada sektor pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, angkutan dan keuangan.

The absorption rate or work force in the period of 1971-1980 was 0.5623 for the whle sectors while the highest rate appeared for bank (7.0914) and 3.6105 in mining sector. The lowest point was in industry (0.2471).

Half-employed point with total working hours less than 35 hours weekly, according to Census 1980 179.960 distributing among the whole sectors. The degree or unemployment as a whole was 1.49%. See Tabel III – 55 and III – 56

The greater number of people lived in small inslands, showing up its irregular spreading, such as 31.47% in Central Molucca, 29.72% Northern Molucca and the least in Central Halmahera i.e. 6.67% of the whole people.

91.45% of work force in the Molucca lived in rural areas and the rest, 8.55% in urbans. The rate of participation of the work force (TPAK) in the Moluccas was still in lower point effected by the lower degree of female TPAK. The development of employment opportunity seem to be better, though it ought that the condition was still short of expectation.

Pada tahun 1980 pola tersebut mengalami perubahan yaitu menjadi 71,18% angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian, 15,32% pada sektor jasa, 5,31% pada sektor perdagangan dan sisanya pada sektor di luar sektor-sektor perdagangan dan sisanya tersebar pada sektor di luar sektor-sektor tersebut.

Keadaan pada tahun 1980 menunjukkan, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja di Maluku mempunyai status pekerjaan sebagai tenaga kerja mandiri (29,55%); bekerja dengan bantuan buruh tak tetap (30,66%); sebagai pekerja keluarga tidak dibayar (20,02%) dan sisanya mempunyai status pekerjaan sebagai pekerja dengan bantuan buruh tetap dan buruh. Lihat Tabel III-53.

Dilihat dari jenis-jenis pekerjaannya dapat dikatakan sebagian besar angkatan kerja yang bekerja mempunyai jenis pekerjaan sebagai tenaga usaha pertanian (64,81%), tenaga produksi (10,87%), tenaga lainnya 7,79% dan sisanya mempunyai pekerjaan sebagai tenaga profesional, tenaga kepemimpinan, tenaga tata usaha, tenaga usaha penjualan dan usaha jasa.

Tahun 1980 komposisi jenis pekerjaan mengalami perubahan yaitu sebanyak 58,90% sebagai tenaga usaha bidang pertanian, 18,08% sebagai tenaga produksi, sebanyak 9,31% sebagai tenaga usaha penjualan. Lihat Tabel III-54.

Daya penyerapan tenaga kerja pada periode 1971 - 1980 adalah 0,5623 untuk seluruh sektor dengan penyerapan tertinggi 7,0914 untuk sektor perbankan, dan 3,6106 untuk sektor pertambangan. Daya penyerapan kesempatan kerja terendah adalah pada sektor industri yaitu 0,2471.

Angka setengah pengangguran yaitu jumlah pekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, menurut hasil sensus 1980 sebesar 179.960 orang yang tersebar di berbagai sektor. Sedangkan tingkat pengangguran secara keseluruhan adalah sebesar 1,49%. Lihat Tabel III-55 dan III-56.

Tabel / *Table III* — 53

KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN TAHUN 1980

EMPLOYMENT OPPORTUNITY BY FIELD OF ACTIVITY AND KIND OF EMPLOYMENT IN 1980

(x 1 orang)

Lapangan Usaha / *Field of Employment*	Status Pekerjaan / *Work Category*						Jumlah / *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian/*Agriculture*	92.872	108.699	1.718	9.322	71.281	576	284.468
Pertambangan/*Mining*	125	150	22	464	66	66	898
Industri/*Industry*	3.694	1.961	597	2.009	1.259	22	9.562
Listrik, Gas, Air/ *Electricity, Gas and Water*	–	–	–	348	–	22	370
Perdagangan/*Trade*	9.890	6.121	349	1.970	2.868	284	21.240
Bangunan/*Construction*	1.701	1.937	554	3.709	321	–	8.222
Pengangkutan/ *Communication-Transportation*	841	479	299	4.903	203	21	6.746
Bank, Asuransi/ *Bank, Insurance*	285	41	65	4.528	–	22	4.941
Sewa Rumah Pemerintah dan Jasa-jasa/*State-owned rent houses and services*	8.588	2.687	699	45.352	3.576	311	61.223
Lain-lainnya/*Others*	–	–	–	109	22	–	131
Tak Terjawab/ *Unanswered*	308	408	108	349	443	214	1.830
Jumlah/*Total*	118.104	122.513	4.411	73.063	79.997	1.538	399.626

Tabel / *Table III* — 54

KESEMPATAN KERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1971, 1980, 1983 DAN 1988

WORKING OPPORTUNITY ACCORDING TO FIELD OF ACTIVITY, 1971, 1980, 1983 AND 1988

(x 1 orang)

Sektor / *Sector*	Kesempatan Kerja 1971 / *Working Opportunity 1971*	Kesempatan Kerja 1980 / *Working Opportunity 1980*	Pertumbuhan Kesempatan Kerja 1971—80 / *Working Opportunity Development 1971-1980*	Kesempatan Kerja 1983 / *Working Opportunity 1983*	Pertumbuhan Kesempatan Kerja 1980—83 / *Working Opportunity Development 1980-1983*	Kesempatan Kerja 1988 / *Working Opportunity 1988*	Pertumbuhan Kesempatan Kerja 1983—88 / *Working Opportunity Development 1983-1988*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian/*Agriculture*	237.965	285.871	2,06	299.467	1,56	355.673	3,50
Pertambangan/*Mining*	62	897	35,57	983	3,10	1.583	10,00
Industri/*Industry*	7.598	9.609	2,64	13.404	11,43	20.292	8,65
Listrik dll./*Others Electricity*	126	372	12,18	723	24,80	1.060	7,95
Bangunan/*Construction*	2.315	8.263	15,19	9.641	5,28	11.221	3,08
Perdagangan/*Trade*	7.052	21.345	13,09	22.672	2,03	34.884	9,00
Angkutan/*Transportation*	5.685	6.779	1,97	7.425	3,08	8.347	2,37
Bank dll./*Bank and others*	241	4.965	39,96	8.526	19,75	10.077	3,40
Jasa lain/*Others vocational*	28.526	61.525	8,92	75.013	6,83	79.531	1,18
Jumlah/*Total*	290.021	399.626	131,08	437.853	75,06	522.667	3,60

Keadaan ketenagakerjaan selama Pelita II dan Pelita III menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Maluku bermukim di pulau-pulau yang relatif kecil sehingga memperlihatkan penyebaran yang tidak merata yaitu sebanyak 31,47% di Maluku Tengah, dan 29,72% di Maluku Utara, kemudian yang paling sedikit adalah di Halmahera Tengah yaitu 6,67% dari seluruh penduduk Maluku.

Angkatan kerja di Maluku adalah 91,45% berada di daerah pedesaan dan sisanya 8,55% berada di perkotaan. Sedangkan keadaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Maluku masih rendah, hal ini dipengaruhi oleh rendahnya TPAK wanita. Pertumbuhan kesempatan kerja dinilai cukup baik, meskipun harus diakui belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan.

12. Transmigrasi

Propinsi Daerah Tingkat I Maluku merupakan daerah yang pertumbuhan dan penyebaran penduduknya tidak menguntungkan. Ada suatu pulau kecil yang relatif kurang potensial mengalami kepadatan penduduk dan dilain pihak ada pulau kecil yang memiliki potensi besar tapi jarang penduduknya. Mengatasi masalah tersebut dilaksanakan

11. Transmigration

The Molucca Province is poor in population distribution, i.e. there is a small and potentially less island gaining crowded population, while in other instance a potentially promising island lacks inhabitants. To solve such problem, the government has begun to realize transmigration and resettlement programmes.

Transmigration realization in the province since Pelita I until Pelita IV has shown a fast development. Pelita I had placed 350 families (1,712 sould) and 200 families (595 soulds) in Pelita II. Target for Pelita III were 16.000 transmigrant families with 7,726 realization (32.716 souls) in Buru island, Seram and Halmahera locations.

Target percentage of that realization is only about 48.29%.To compare with the condition at the end of Pelita II, there is and increment of occupation as 191.95%. See Table III–57

Though with unstable increase and spreading of population, the province still welcome transmigrants from Java island. This is for the purpose to support the national transmigration programme.

Tabel / *Table III — 55*

SETENGAH PENGANGGURAN MENURUT LAPANGAN USAHA DAN JENIS PEKERJAAN TAHUN 1980
HALF UNEMPLOYMENT ACCORDING TO FIELD OF ACTIVITY AND TYPE OF WORK 1980

(x 1 orang/*person*)

Lapangan Usaha / *Field of Activity*	0/1 *)	2 *)	3 *)	4 *)	5 *)	6 *)	7/8/9 *)	x/00 *)	TT	Jumlah / *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian, Kehutanan/ *Agriculture, Forestry* Perkebunan, Perikanan/ *Farming, Fishery*	—	—	40	110	108	143,771	825	—	65	144.919
Pertambangan dan Penggalian/ *Mining, Quarrying*	—	—	—	—	—	20	168	—	132	320
Industri Pengolahan/ *Manufacturing Industry*	21	—	—	135	22	—	3.511	—	—	3.686
Listrik, Gas dan Air/ *ELectricity, Gas, Water*	—	—	44	—	—	—	22	—	—	66
Bangunan/*Construction*	—	20	—	—	22	—	1.770	—	—	1.812
Perdagangan Besar, Eceran/ *Wholesale, Retailer* Rumah makan/*Restaurant*	—	22	—	6.677	44	—	346	—	—	7.089
Angkutan, Pergudangan/ *Transportation and Warehousing* Komunikasi/*Communication*	65	—	154	—	42	—	840	—	22	1.122
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan Tanah, Jasa Perusahaan/*Finance, Insurance, Building, Rental, Land, Company Service.*	22	—	127	84	305	65	—	—	—	603
Jasa Kemasyarakatan/ *Public Service*	7.163	22	4.329	282	3.457	340	3.207	749	65	19.614
Lainnya/*Other*	—	—	—	—	—	—	22	—	22	44
Tidak Terjawab/*Unanswered*	—	—	—	22	—	40	20	—	603	685
Jumlah/*Total*	7.270	64	4.694	7.307	4.000	144.236	10.731	749	909	179.960

Keterangan / ***Explanation:***

*0/1 *) = **Tenaga Profesional, Teknisi dan lain-lain/Professionals, Technicians etc.***
2 *) = *Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan/**Executives and Staff.***
3 *) = *Tenaga Tata Usaha dan Sejenis/**Administration and the kind.***
4 *) = *Tenaga Usaha Penjualan / **Sales Marketing***
5 *) = *Tenaga Usaha Jasa Umum / **General Public services.***
6 *) = *Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan / **Agriculture, Forestry, Farming and Fishery.***
7/8/9 *) = *Tenaga Produksi, Operator, Alat-alat Angkat, Pekerja Kasar / **Production workers, Operators, Heavy duties, Common labourers.***
x/00 *) = *Tenaga Usaha Jasa Lain-lain / **Other Public services.***
TT = *Tidak Terjawab. / **Unanswered***

Tabel / *Table III — 56*

TINGKAT PENGANGGURAN MENURUT KABUPATEN/KOTAMADYA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1980
RATE OF UNEMPLOYMENT ACCORDING TO DISTRICT/ MUNICIPALITY AND SEX, 1980

Kabupaten/Kotamadya / *District/Municipality*	Laki-laki / *Male*			Perempuan / *Female*			Laki-laki + Perempuan / *Male + Female*		
	Jml Pencari Kerja / *Employment seekers*	Jml Angkatan Kerja / *Total work Force*	Tkt. Pengangguran / *Rate of Unemployment*	Jml Pencari Kerja / *Employment seekers*	Jml Angkatan Kerja / *Total Work Force*	Tkt. Pengangguran / *Rate of Unemployment*	Jml Pencari Kerja / *Employment seekers*	Jml Angkatan Kerja / *Total Work Force*	Tingkat Pengangguran / *Rate of Unemployment*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas District*	261	50.445	0,52	420	42.777	1,00	681	92.522	0,74
Kab. Maluku Tengah/ *Central Moluccas District*	680	79.472	0,86	435	22.564	1,93	1.115	102.036	1,09
Kab. Halmahera Tengah/ *Central Halmahera District*	502	19.430	2,58	261	7.791	3,35	763	27.221	2,80
Kab. Maluku Utara/ *North Moluccas District*	1.230	89.614	1,37	1.301	42.299	3,08	2.531	131.913	1,92
Kodya Ambon/ *Ambon Municipality*	707	39.578	1,79	218	10.574	2,06	925	50.152	1,84
Jumlah/*Total*	3.380	278.539	1,21	2.635	125.305	2,10	6.015	403.844	1,49

program transmigrasi dan resettlement penduduk.

Pelaksanaan transmigrasi di Propinsi Maluku sejak Pelita I sampai awal Pelita IV telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Dalam Pelita I telah berhasil ditempatkan 350 KK (1.712 jiwa), namun pada Pelita II meningkat menjadi 200 KK (595 jiwa). Pada Pelita III yang ditargetkan penempatan sebanyak 16.000 KK transmigran, berhasil

Data from the Transmigration Regional Office of Molucca Province show that there are 8,112 families (34,252 souls) at the transmigration areas, each occupying the allocated plot. Originally they are from West Java province 647 families (2,756 souls), Central Java province 3,274 families (2,755 souls), Central Java province 3,274 families (14,444 souls), and East Java 4,191 families (17,052 souls).

direalisir sebanyak 7.726 KK (32.716 jiwa) pada lokasi pulau Buru, Seram dan Halmahera.

Pencapaian hasil tadi dihitung dengan prosentase dari target, hanya mencapai ± 48,29%. Dibandingkan dengan keadaan di akhir Pelita II terjadi peningkatan penempatan transmigran sebesar 191,95%. Lihat Tabel III-57.

Walaupun Propinsi Maluku mengalami pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, tapi bagi daerah ini juga banyak didatangi para transmigran dari Pulau Jawa. Hal ini bertujuan untuk mendukung transmigran secara nasional.

Berdasarkan data dari Kanwil Transmigrasi Propinsi Maluku, di daerah transmigrasi sudah ditempatkan para transmigran berasal dari Pulau Jawa sebanyak 8.112 KK (34.352 jiwa). Dari jumlah tersebut menyebar pada lokasi yang telah ditentukan. Transmigran itu terdiri dari Propinsi Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat 647 KK (2.756 jiwa), Jawa Timur 4.191 KK (17.052) jiwa, dan Jawa Tengah 3.274 KK (14.444 jiwa). Lihat Tabel III-58.

Para transmigran di Propinsi Maluku, pada umumnya adalah petani-petani yang di daerah asalnya memiliki tanah yang sempit bahkan sebagian sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap. Dalam penggunaan tanah yang diberikan Pemerintah secara optimal, maka tanah berupa lahan yang diterima oleh transmigran diusahakan pengelolaannya lebih produktif.

Tabel / *Table III — 57*

REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRAN DI PROPINSI MALUKU SELAMA PELITA III
TRANSMIGRANT PLACEMENT IN THE PROVINCE OF THE MOLUCCA DURING PELITA III

Tahun *Year*	**Lokasi** *Location*	**Realisasi** *Realization*	
		KK/*Family*	**Jiwa/*Soul***
1979/1980	Pulau/*island* Buru	2.000	8.388
1980/1981	Pulau/*island* Buru	2.000	8.484
1981/1982	Pulau/*island* Halmahera:		
	— Kao	400	1.797
	— Wasile	800	3.438
1982/1983	Pulau/*island* Halmahera		
	— Kao	200	831
	Wasile	900	3.953
	Pulau/*island* Seram		
	— Pasahari	1.000	4.146
1983/1984	Pulau/*island* Seram		
	Pasahari	426	1.680
	Jumlah *Total*	7.726	32.716

Tabel / *Table III — 58*

PROGRAM DAN REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRASI DI MALUKU S/D TANGGAL 31 MARET 1986, DIPERINCI MENURUT DAERAH ASAL, LOKASI DAN TAHUN PROGRAM
TRANSMIGRATION PLACEMENT IN MOLUCCA UP TO 31 MARCH 1986, BY AREA OF ORIGIN

Tahun Program *Year*	Lokasi *Location*	Target *Target*	Jawa Timur *East Java*		Jawa Tengah *Central Java*		Jawa Barat *West Java*		A P P D T *Local*		Jumlah *Total*		Sisa *Unfulfilled*
		KK *Family*	KK *Family*	JW	KK *Family*	JW	KK *Family*	JW	KK *Family*	JW	KK *Family*	JW	KK *Family*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1979/1980	P. Buru (SKP-A)	2.000	624	2.523	600	2.722	399	1.751	377	1.392	2.000	8.388	—
1980/1981	P. Buru (SKP-B)	2.000	921	3.889	651	2.898	91	362	337	1.354	2.000	8.483	—
1981/1982	Kao	400	152	636	207	917	—	—	41	244	400	1.797	—
	Wasile	800	363	1.435	348	1.599	—	—	89	404	800	3.430	—
	Pasahari	1.000	444	1.702	356	1.589	—	—	200	855	1.000	4.146	—
1982/1983	Kao	200	174	735	—	—	—	—	26	96	200	831	
	Wasile	900	367	1.480	459	2.118	—	—	74	355	900	3.953	—
	Pasahari	1.550	845	3.432	401	1.618	149	613	155	842	1.550	6.505	—
1983/1984	Kao	425	—	—	94	403	—	—	87	419	181	822	244
	Wasile	600	179	713	98	350	8	30	57	300	342	1.393	258
	Pasahari	210	122	527	60	230	—	—	21	110	203	867	7
1984/1985	Kao Toliwang	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500
	Kao Pediwang	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	350
	Goal	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300
	Toloba Ekor	1.000	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000
	Jumlah *Total*	12.235	4.191	17.052	3.274	14.444	647	2.756	1.405	6.071	9.576	40.623	2.659

Sumber : Kanwil Departemen Transmigrasi Dati I Maluku
Source : Regional Office of the Ministry of Transmigration, Molucca Province.

Dengan demikian sebelum suatu lokasi dibuka untuk pemukiman transmigrasi, terlebih dahulu diadakan studi atau penelitian pada lokasi yang ditentukan. Penelitian untuk pemilihan lokasi yang cocok bagi pemukiman transmigrasi dan pengembangan usaha pertanian, dimaksudkan agar tata ruang, pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran hasilnya dapat meningkatkan sosial budaya atau taraf hidup para transmigran.

Sesuai dengan rencana dan realisasi penempatan transmigrasi di Propinsi Maluku sampai akhir Pelita III, telah disediakan lahan potensial seluas 178.000 Ha dengan rencana penempatan 16.000 KK dan baru terealisir hanya 7.726 KK di berbagai daerah di Maluku. Sedangkan di pulau Buru (Savanajaya) lokasi yang diberikan lahan terbesar yaitu 100.000 Ha, berhasil mencapai realisasi sesuai dengan target sebesar 4.000 KK.

Pada lokasi transmigrasi Pasahari (Pulau Seram), Wasile (Pulau Halmahera), dan Kao (Pulau Halmahera), realisasi penempatan sedang dalam penyelesaian. Untuk 2 (dua) daerah lokasi seperti Weda (Pulau Halmahera) dan Makariki (Pulau Seram), belum direalisir karena masih memerlukan survey penggunaan lahan yang tepat bagi penempatan transmigran. Lihat Tabel III-59.

In general the transmigrants in Molucca originally were famers in their original province who had only small land and even a lot who were without any possessio, in case of their peasant duty. So to gain maximum usage or the land given by the Government, they ought to cultivate it in more productive way.

Before a transmigration location can be openly cultivated, a careful research and study ought to be taken. Research for a decision of location which is suitable for transmigration dwelling, development of agriculture, i.e. so that spatial management, production development, cultivation and selling were possible and in better change, to improve those transmigrants living condition and culturalization.

True to the planning, the realization of transmigration of placement in the Molucca Province to the end of Pelita III, 178,000 Ha potential area had been prepared, with occupational plan of 16,000 families, but realization only reached the amount of 7,726 families throughout the province. The island of Buru (Savanaya) as the greatest area prepared i.e. : 100,000 Ha, was able to reach realization according to the target as 4,000 families.

At locations of Pasahari (seram island), Wasile (Halmahera) and Kao (also Halmahera) pacement realization is still in work. For 2 locations ie. Weda (Halmahera) an Makariri (Seram island) still without realization because the two areas still need survey to decide exact area for transmigration settlement.

Tabel / *Table III — 59*

LUAS LAHAN, RENCANA DAN REALISASI PENEMPATAN TRANSMIGRAN DI PROPINSI MALUKU (KEADAAN AKHIR PELITA III)
POTENTIAL AREA, TARGET AND REALIZATION OF TRANSMIGRATION IN MOLUCCA PROVINCE (BY THE END OF PELITA III)

No	Lokasi / *Location*	Luas lahan Potensial / *Potential Area (Ha)*	Rencana Penempatan (KK) / *Target (Family)*	Realisasi Penempatan (KK) / *Realization (Family)*
1.	K a o (P. Halmahera)	15.000	4.000	600
2.	Wasile (P. Halmahera)	9.000	2.000	1.700
3.	Savanajava (P. Buru)	100.000	4.000	4.000
4.	Weda (P. Halmahera)	9.000	2.000	—
5.	Makariki (P. Seram)	5.000	2.000	—
6.	Pasahari (P. Seram)	40.000	2.000	1.426
	Jumlah / *Total*	178.000	16.000	7.726

Resettlement

Melihat penyebaran penduduk di Propinsi Maluku, tidak menguntungkan ditinjau dari segi pemerataan dan ketahanan wilayah. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi ketidakseimbangan penyebaran penduduk dan suku terasing di Maluku ditempuh suatu program Resettlement yaitu memindahkan penduduk dari pulau-pulau kecil ke pulau-pulau besar yang potensi ekonominya tinggi dan membina kesejahteraan suku terasing dengan pemukiman kembali pada tempat-tempat yang lebih baik, juga untuk menanggulangi daerah-daerah kritis dan daerah korban bencana alam.

Dalam Pelita III di Propinsi Maluku, telah berhasil diresetel sebanyak 5.790 KK meliputi 16.273 jiwa dari rencana target 3.750 KK. Sebagian besar dari pelaksanaan resettlement tersebut, dibiayai dengan dana APBD tingkat I Propinsi Maluku. Pada tahun 1984/1985 berhasil dipindahkan sebanyak 715 KK, sedang pada tahun 1985/1986 juga dipindahkan lagi sebanyak 500 KK. Dengan demikian dua tahun Repelita IV, di Propinsi Maluku jumlah penduduk yang di resettlement mencapai 1.215 KK.

Resettlement

Population distribution in the Moluccas province in fact was not in line from the view of work force distribution and regional defence. The steps taken to solve such population distribution imbalances and also for the solution of primordial tribe in the province was a resettlement programme i.e. to move the people from small island to greater islands with greater economic potential, and to improve the prosperity of those backward primordial tribe by their resettlement to better place and also to overcome critical areas and natural disaster locations.

Resettlement realization during Pelita III in the province of Moluccas reached totally 5.790 families amounting to 16,273 souls from target plan of 3.750 families. The greater part of that realization was funded with APBD fund of the province Administration. In 1984/1985 it suceceded to resettle 715 families, in 1985/1986 again with 500 families. So after two years in the era of REPELITA IV in the Moluccas province total resettlement reached 1,215 families.

B A B / *CHAPTER IV*

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL

SOCIAL DEVELOPMENT

1. Agama

SESUAI dengan falsafah negara Pancasila, pelayanan kehidupan beragama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan. Kehidupan beragama di Propinsi Maluku diarahkan kepada peningkatan amal untuk kepentingan bersama membangun masyarakat, sekaligus mengatasi berbagai sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan pembangunan.

Berbagai kegiatan pembangunan di Propinsi Maluku untuk bidang agama, hasil-hasilnya dapat dinikmati dan dijadikan landasan bagi pembangunan kurun waktu berikutnya. Dengan kata lain, untuk kerukunan hidup dan toleransi hidup umat beragama telah terbina dan terpelihara dengan baik. Kesemuanya dibuktikan dengan penyediaan fasilitas/ sarana peribadatan, maupun peningkatan pembinaan bidang agama yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Dalam kegiatan pembangunan bidang agama di Propinsi Maluku melihat keadaan tahun 1985 melibatkan semua golongan yang ada, yaitu golongan agama Islam sebanyak 855.729 pemeluk, Kristen Katholik sebanyak 81.065 pemeluk, Kristen Protestan sebanyak 585.642 pemeluk, Hindu/Budha sebanyak 1.990 pemeluk. Mereka yang belum memeluk agama seperti masyarakat terasing sebanyak 9.931 orang. Pemeluk agama Islam yang terbanyak berada di Maluku Utara (317.825 orang) dan Maluku Tengah (310.886 jiwa).

Agama Kristen yang tersebar ada di Maluku Tenggara, 62.185 pemeluk (Kristen Katholik), dan Maluku Tengah sebanyak 158.484 pemeluk (Kristen Protestan).

Di Maluku Tengah jumlah pemeluk agama terbesar ialah Hindu/Budha sebanyak 718 pemeluk, dan yang belum memeluk agama sebanyak 7.567 orang.

Berbagai kegiatan pembangunan untuk menciptakan kerukunan beragama di Propinsi Maluku, dalam Pelita III meliputi 6 (enam) program: Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama, Penerangan dan Bimbingan Hidup Beragama, Pelayanan Ibadah Haji, Pendidikan dan Perguruan Agama, Peranan Wanita dan Generasi Muda, Penelitian dan Pengembangan Agama.

a. Sarana Kehidupan Beragama

Usaha pembangunan sarana kehidupan beragama, pada hakekatnya ialah usaha pembangunan masyarakat seutuhnya. Di seluruh Propinsi Maluku jumlah tempat peribadatan pada tahun 1985, 1.398 Mesjid, 459 Mushola dan Langgar, 235 Gereja Katholik, 1.329 Gerja Protestan, 6 Pura, dan 2 Wihara.

Jumlah tempat peribadatan, tidak disesuaikan dengan jumlah pemeluk agama di masing-masing daerah di Propinsi Maluku. Di Maluku Utara jumlah penduduknya 317.825 pemeluk agama Islam dan tempat peribadatan sebanyak 472 Mesjid dan 151 Mushola. Sedangkan Maluku Tenggara yang pemeluk agama Islam hanya 53.357 pemeluknya, terdapat tempat peribadatan 178 Mesjid dan 37 Mushola. Lihat Tabel IV-1 dan IV-2.

Dalam meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi tempat peribadatan di Propinsi Maluku, sejak Pelita I ditingkatkan terus dalam memenuhi keperluan bagi masing-masing pemeluk agama.

Untuk pembangunan/rehabilitasi tempat ibadat bagi pemeluk agama Islam, pemerintah telah memberikan bantuan sejak Pelita I - Pelita IV tahun ke—II sejumlah 445 kali pada 442 buah Mesjid dengan biaya sebesar Rp 657.895.000,-. Lihat Tabel IV-3.

Untuk bantuan pembangunan Gereja Protestan dan Katholik pemerintah sejak Pelita I - Pelita IV tahun ke—II membangun 228 buah dengan biaya Rp 311.806.000,- di semua daerah Propinsi Maluku. Pelaksanaan pembangunan Gereja baru dimulai pada Pelita II, yaitu di daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Sedangkan pada Pelita III, mulai menyebar di seluruh Kotamadya/Kabupaten di Propinsi Maluku secara fisik 69 buah dengan bantuan sebesar Rp 72.700.000,- Dan untuk Pelita IV tahun ke—II, meningkat menjadi 161 buah dengan bantuan sebesar Rp239.106.000,-. Lihat Tabel IV-4.

Bagi agama Hindu dan Budha selama Pelita I — Pelita IV tahun ke—II, pemerintah telah memberikan bantuan pembangunan tempat peribadatan (Pura/Wihara) 6 buah dengan biaya Rp 9.000.000,- Tempat peribadatan ini, baru dilaksanakan pembangunan di Kotamadya Ambon dan Maluku Tengah. Lihat Tabel IV-5.

1. Religion

ACCORDING to the philosophy of the Pancasila, religious service and believe in God ought to be developed and improved. Religious life in the Province of Molucca is directed toward improvement of mutual interest to step up the welfare of the people as well as overcoming all socio-cultural problems which may hinder the development progress.

The development of various religions in the Molucca Province does not only serve the present-day living needs but also it may become a foundation for the next development target. In other words, peaceful coexistence and mutual adaptation among the people in various religious veliefs had been achieved. All of it can be seen in the development of worships facilities and in religions life guidance which is increasing year-by-year.

In case of religious development in the Province of the Molucca, in 1985 it involved the whole religious groups i.e. Islam with 853,729 believers, Catholics 81,065, Protestants 585,642 members and Hindu/Budha 1,990 members. Those who are still without any registered religion consist of the primordial tribes totally 9,931. Islam believers mostly dwelled in North Molucca area (317,825) and Central Molucca (310,886). Most of the Christiants living in Southeast Molucca numbered 62,185 (Catholic) and Central Molucca 158,484 (Protestants). In Central Molucca also live Hindu/Budha believers numbered 718 and those who were without registered religion totalled 7,567.

Various development activities in the Province of Moluccas to achieve peaceful religious life among the people during Pelita III belonged to 6 (six) programmes : Development of Facilities and Infrastructures for Religious Life, Information and Guidance in Religious Life, Service of Haj Pilgrimage, Education and Religion Institute, the Role of Women and the Younger Generation, Research and Development of Religion.

a. Facility of Religious Life

Efforts to develop religious life facilities in principle are the efforts to develop a regined community. Through out the province the number of houses of worship in 1985 were as follows : 1,398 mosques, 459 Mushola and small mosques, 235 Catholic churches, 1,329 Protestants churches, 6 Hindu Puras and 2 Budha Viharas.

The number of houses of worship are not necessarily in proportion with the number of religious velievers in the related places. In North Molucca for instance, the total Islam people are 317,825 with places of worship amounting to 472 mosque and 151 musholas, while people in Southeast Moluccas who are Islam only numbered 53,357 with places of worship as many as 178 mosque and 37 musholas. See Tables III - 1 and IV - 2.

Since Pelita I the government still continues to improve religion worship facilities, constructing and rehabilitating the facilities for each of the believer groups.

For development and rehabilitation of places of worship among Islam people, the government has already given aids since Pelita I to Pelita IV second year as much as 445 times for 442 mosques with a total budget of Rp 657,895,000. See Table IV - 3.

For development of Catholic and Protestant churches since Pelita I to second year of Pelita IV, the government already realized development aid for 228 churches costing Rp 311,806,000 throughout the province. Realization of construction was just started in Pelita II, i.e. in the District of Central Molucca and Southeast Molucca. In the years of Pelita III, physical construction began to reach the whole municipalities and districts in the province, totally covering 69 buildings with total aids of Rp 72,700,000. and to the second year of Pelita IV the realization became 161 buildings with the total cost of Rp 239,106,000. See Table IV - 4.

For the Hindu and Budha believers during Pelita I to the second year of Pelita IV, the government already realized development aids to build Puras and Wiharas covering 6 buildings with a total value of Rp 9,000,000. The buildings are located in Ambon and Central Molucca. See Table IV - 5.

b. Religious Life Services

To affirm marriage according to religious regulations and in accordance with the public valid laws, administrator of the Molucca Province during

Tabel / *Table IV — 1*

JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA DI PROPINSI MALUKU KEADAAN TAHUN 1985

Kodya/Kabupaten *District/Municipality*	Jumlah Penduduk Per Agama *Population Number*					
	Islam *Islam*	Katholik *Catholic*	Protestan *Protestant*	Hindu Budha	Lain-lain *Others*	Jumlah *Total*
Kodya Ambon/ Ambon Municipality	88.987	7.136	119.181	524	576	216.404
Maluku Tengah/ Central Moluccas	310.886	5.678	158.484	710	7.912	483.333
Maluku Utara/ North Moluccas	317.825	5.772	144.434	230	954	469.215
Halmahera Tengah/ Central Halmahera	84.674	294	22.575	20	235	197.799
Maluku Tenggara/ Southeast Moluccas	53.357	62.185	140.968	498	558	257.606
J u m l a h	855.729	81.065	585.642	1.990	9.981	1.534.357

Sumber : Kanwil Departemen Agama Propinsi Maluku.
Source : *Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, the Province of Molucca.*

b. Pelayanan Hidup Beragama

Dalam memantapkan persyaratan pernikahan sesuai dengan hukum agama dan ketentuan yang berlaku, pemerintah Daerah Propinsi Maluku selama Pelita I sampai pelita IV tahun ke II telah membangun 61 buah Balai Nikah/Penasehatan Perkawinan.

Pada Pelita I untuk Balai Nikah/Penasehatan Perkawinan ini, hanya dibangun di Kotamadya Ambon saja. Sedang dalam Pelita II, dikembangkan pembangunan di Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Propinsi Maluku sebanyak 7 buah, yaitu di Maluku Utara 1 buah, Maluku Tengah 2 buah, Maluku Tenggara 2 buah, dan Halmahera Tengah 2 buah. Di Maluku Utara pada Pelita III, dibangun Balai Nikah/Penasehatan Perkawinan sebesar 10 buah, Maluku Tengah 9 buah, Maluku Tenggara 3 buah, Halmahera Tengah 4 buah, dan Kotamadya Ambon hanya 1 buah. Lihat Tabel IV-6.

Dari Pelita III sebanyak 27 buah yang sudah dibangun, sampai Pelita IV tahun ke—II sudah mencapai jumlah sebesar 26 buah yaitu meliputi: Kotamadya Ambon 2 buah, Maluku Utara 11 buah, Maluku Tengah 10 buah, dan Halmahera Tengah 3 buah.

Upaya pemerataan keadilan dan pelayanan hukum pada masyarakat di bidang agama, selama Pelita I sampai Pelita IV tahun ke—II telah dibangun 14 buah Balai Sidang Pengadilan Agama di Propinsi Maluku.

Pelaksanaan pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama ini, baru dimulai sejak Pelita II sebanyak 4 buah masing-masing di Kotamadya Ambon, Maluku Utara, Halmahera Tengah dan Maluku Tenggara. Dilanjutkan pada Pelita III sebanyak 9 buah di Maluku Utara sebanyak 5 buah, dan masing-masing 1 buah di Kotamadya Ambon, Maluku

Pelita I to the second year of Pelita IV had built 61 wedding halls/marriage counselling buildings.

During Pelita I such construction was only realized in Ambon Municipality only. In Pelita II it spread to the whole districts in the Province of Moluccas, i.e. : North Molucca 1 building, Central Molucca 2, Southeast Molucca 2 and Central Halmahera 2, totally 7 buildings. During Pelita III in North

Tabel / *Table IV — 2*

JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1985
NUMBER OF PLACES OF WORSHIP IN THE PROVINCE OF MOLUCCA IN 1900

Kotamadya/Kabupaten *Municipality/District*	Mesjid/ Mushalla *Mosque Mushola*	Gereja Katholik *Catholic Church*	Gereja Protestan *Protestant Church*	Pura Wihara *Pura Wihara*	Jumlah *Total*
Kodya Ambon/ Ambon Municipality	62/24	16	114	1/1	218
Maluku Tengah Central Moluccas	530/93	38	406	5/1	1.073
Maluku Utara/ North Moluccas	472/151	21	389	—	1.073
Halmahera Tengah/ Central Halmahera	156/154	3	79	—	352
Maluku Tenggara/ Southeast Moluccas	178/37	157	341	—	713
J u m l a h / T o t a l	1.398/459	235	1.329	6/2	3.429

Sumber : Kanwil Dep. Agama Prop. Maluku
Source : *Religious Ministry, Regional Office of the Province of the Molucca.*

Tabel / *Table IV — 3*

JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI TEMPAT IBADAH (MESJID) PROPINSI MALUKU SELAMA PELITA I — PELITA IV TAHUN KE—II
NUMBER OF AIDS FOR THE DEVELOPMENT AND REHABILITATION OF WORSHIP PLACES (MOSQUES) IN THE PROVINCE OF MOLUCCA DURING PELITA I TO SECOND YEAR OF PELITA IV

(dalam ribuan rupiah)/*(dalam/InRp)*

Bantuan Pelita *Pelita aid*	Biaya *Cost*				Jumlah *Total*
	PELITA I	PELITA II	PELITA III	PELITA IV	
4 × 1 Mesjid (Al Fatah)	57.000	—	—	—	57.000
38 buah Mesjid	—	46.150	—	—	46.150
242 buah Mesjid	—	—	314.100	—	314.100
161 buah Mesjid	—	—	—	240	240.645
Jumlah/Total 145 kali	57.000	46.150	314.100	240	657.895

Sumber : Kanwil Dep Agama Maluku
Source : *Regional Office of Religion Dept. Moluccas*

Tabel / *Table IV — 4*

JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN (GEREJA) PROTESTAN & KATHOLIK PROPINSI MALUKU SELAMA PELITA I — IV TH. II
NUMBER OF AIDS FOR DEVELOPMENT OF PLACES OF WORSHIP (CHURCHES) OF PROTESTANT AND CATHOLIC DURING PELITA II TO SECOND YEAR OF PELITA IV

(dalam ribuan rupiah)

Kotamadya/Kabupaten *District/Municipality*	Pelita I		Pelita II		Pelita III		Pelita IV		Jumlah *Total*	
	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*
Kotamadya Ambon/ Ambon Municipality	—	—	—	—	19	21.050	24	35.875	43	56.925
Maluku Tengah/ Central Moluccas	—	—	4	2.000	20	23.000	41	61.136	65	64.136
Maluku Utara/ North Moluccas	—	—	—	—	12	12.850	38	55.975	40	68.825
Halmahera Tengah/ Central Halmahera	—	—	—	—	2	2.000	33	49.260	35	51.260
Maluku Tenggara/ Southeast Moluccas	—	—	4	2.000	16	13.800	25	36.860	45	50.660
J u m l a h / T o t a l	—	—	8	4.000	69	72.700	161	239.106	228	311.806

Sumber Kanwil Departemen Agama Propinsi Maluku
Source : *Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, the Province of Molucca*

Tabel / *Table IV — 5*

JUMLAH BANTUAN PEMBANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN (PURA/WIHARA) AGAMA HINDU/BUDHA PROPINSI MALUKU SELAMA PELITA I — PELITA IV TH. II
AMOUNT OF AIDS GIVEN FOR THE DEVELOPMENT OF PLACES OF WORSHIP (PURA/WIHARA) OF HINDU/BUDHA DURING PELITA II — PELITA IV (SECOND YEAR) IN THE PROVINCE OF MOLUCCA

(dalam ribuan rupiah)

Kotamadya/Kabupaten *District/Municipality*	Pelita I		Pelita II		Pelita III		Pelita IV		Jumlah *Total*	
	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya *Cost*	Fisik *Building*	Biaya
Kotamadya Ambon/ *Ambon Municipality*	—	—	—	—	1	3.500	1	1.100	2	4.600
Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	—	—	—	—	—	—	4	4.400	4	4.400
Jumlah / *Total*	—	—	—	—	1	3.500	5	5.500	6	9.000

Sumber : Kanwil Departemen Agama Propinsi Maluku
Source : Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, The Province of Molucca

Tengah, Halmahera Tengah, dan Maluku Tenggara. Pengadilan Tinggi Agama Cabang Kotamadya Ambon, baru dibangun 1 buah. Lihat Tabel IV-7.

Selama Pelita III kepada umat beragama peningkatan penerangan serta bimbingan hidup beragama, antara lain meliputi: pembinaan rohani para remaja, pembinaan masyarakat transmigrasi. Pemanfaatan media Radio Republik Indonesia (RRI) dengan siaran keagamaan, fragmentasi dan sandiwara, peningkatan kegiatan dakwah dan penerangan agama, pengadaan paket-paket dakwah, penerbitan brosur keagamaan, pengadaan buku-buku agama, penataran P4 bagi umat beragama, pagelaran remaja, pengembangan seni budaya melalui pembinaan benda-benda bersejarah yang bernafaskan agama dan pembinaan MTQ.

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang kelima, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Karena itu, dari tahun ke tahun umat Islam beramai-ramai pergi menunaikan Ibadah Haji.

Selama Pelita III, telah diberangkatkan sebanyak 2.642 jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, rata-rata sebanyak 258 jemaah tiap tahunnya. Yang meninggal dunia sebanyak 59 orang selama Pelita III, adalah mereka yang telah lanjut usia.

Kemudian berdasarkan Angka Statistik tahun 1984, jumlah jemaah haji laki-laki dari Propinsi Maluku ada sebanyak 110 orang dan perempuan 113 orang. Tahun berikutnya 1985, laki-laki sebanyak 89 orang dan perempuan 60 orang. Jumlah seluruhnya dalam dua periode itu ialah 372 orang. Lihat Tabel IV-8.

Tabel / *Table IV — 6*

PEMBANGUNAN BALAI NIKAH/PENASEHATAN PERKAWINAN SELAMA PELITA I — IV TAHUN KE—II
DEVELOPMENT OF WEDDING HALLS/MARRIAGE COUNSELLING BUILDINGS PELITA I—SECOND YEAR OF PELITA IV

Kotamadya/Kabupaten *Municipality/Districts*	Pelita I	Pelita II	Pelita III	Pelita IV
1. Kotamadya Ambon/ *Ambon Municipality*	1	—	1	2
2. Maluku Utara/ *North Moluccas*	—	1	10	11
3. Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	—	2	9	10
4. Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	—	2	3	—
5. Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	—	2	4	3
Jumlah / *Total* 61 buah	1	7	27	26

Sumber : Kanwil Dep Agama Propinsi Maluku.
Source : Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, Province of Molucca

c. Pendidikan dan Perguruan Agama

Berbagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan beragama, disamping pendidikan umum juga telah dilembagakan dalam salah satu bentuk yaitu Perguruan Agama seperti Madrasah, Pendidikan Guru Agama, dan Pendidikan Tingkat Agama (IAIN).

Mutu pendidikan agama dari tingkat Ibtidaiyah sampai tingkat Aliyah, senantiasa ditingkatkan dan langkah penyerasian dilakukan

Molucca 10 buildings of wedding halls/marriage counselling were constructed, while in Central Molucca 9, Southeast Molucca 3, Central Halmahera 4 and Ambon Municipality only 1 building.

During Pelita III a total of 27 had been constructed, while during the first two years of Pelita IV as many as 26 had been built, i.e. : Ambon Municipality 2, North Molucca 11, Central Molucca 10 and Central Halmahera 3 buildings. See Table IV - 6.

Efforts to effect equal distribution in justice and law services in the religious sector for the people during Pelita I to Pelita IV (second year) in the Province of Molucca appear in the realization of construction of 14 Religious Court buildings.

Realization of the construction just started in Pelita II covering 4 buildings one each for Ambon Municipality, North Molucca, Central Halmahera, Southeast Molucca. It was continued in Pelita III with 9 buildings, 5 in North Molucca and one each for Ambon Municipality. Central Molucca, Central Halmahera and Southeast Molucca. Religious Appelate Court exists only 1 building in ambon Municipality. See Table IV - 7.

Tabel / *Table IV — 7*

PEMBANGUNAN BALAI SIDANG PENGADILAN AGAMA SE MALUKU SELAMA PELITA I — IV TAHUN KE—II
DEVELOPMENT OF RELIGIOUS COURT BUILDINGS THROUGBOUT MOLUCCA DURING PELITA I — IV (SECOND YEAR)

Kotamadya/Kabupaten *Municipality/District*	Pelita II	Pelita III	Pelita IV Th Ke—II
Kotamadya Ambon/*Ambon Municipality*	1	1	1
Maluku Tengah/*Central Moluccas*	—	1	—
Maluku Utara/*North Moluccas*	1	5	—
Halmahera Tengah/*Central Halmahera*	1	1	—
Maluku Tenggara/*Southeast Moluccas*	1	1	—
Jumlah /*Total* 14 buah	4	9	1

Sumber Dep Agama Propinsi Maluku.
Source : Regional Office of the Ministry of Religious Affairs, Province of Molucca.

During Pelita III intensified information and guidance for the people had been given, among others for promotion of religious life, transmigrants spiritual care, utilization of Radio Republik Indonesia (RRI) with religious programme, fragments and dramas, intensification of religious preaching and information, production of ministry parcels, printing of religious brochures, publication of religious books, P4 (Guide to Enlightment and Application of Pancasila) courses for religious pacilities which hold historical value, and MTQ (Reading Al Qur'an Competition) improvement.

Haj Pilgrimage is the fifth Islam's pillar, which cannot be divided from the living of Islam believers. For that case from year-to-year group Islam believers go to Haj Pilgrimage.

During Pelita III a total of 2.642 believers had gone to Hal Pilgrimage in Mecca Holy Land, Saudi Arabia, with 258 believers as annual rate. During Pelita III the dead numbered 59 believers because their old age condition.

According to Statistics in 1984, Haj Pilgrimage in the Molucca Province numbered 110 male and 113 female. In the next year 1985, the pilgrimage were 89 male and 60 female, and for the two periods they totalled 372 hajs. See Table IV - 8.

Tabel / *Table IV — 8*

JUMLAH JEMAAH HAJI MENURUT JENIS KELAMIN DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1984 dan 1985
NUMBER OF HAJ PILGRIMAGE BY SEX IN THE MOLUCCA PROVINCE 1984 AND 1985

Kabupaten/Kotamadya *District/Municipality*	Laki-laki *Male*		Perempuan *Female*		Jumlah *Total*	
	1984	1985	1984	1985	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7
Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	6	7	10	1	16	8
Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	32	19	42	19	74	38
Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	6	9	5	3	11	12
Maluku Utara/ *North Moluccas*	48	39	23	17	71	56
Kodya Ambon/ *Ambon Municipality*	18	15	33	20	51	35
Maluku / *Moluccas*	110	89	113	60	223	149

Sumber : Kanwil Dep Agama Propinsi Maluku.
Source : Ministry of Religious Affairs, Regional Office, Province of Molucca.

sesuai dengan Pola Pendidikan Umum. Hal itu dimaksudkan, agar dapat menjajagi status penegerian pendidikan agama baik tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, maupun Aliyah yang sudah dapat memenuhi persyaratan. Perlengkapan sarana fisik berupa gedung/ruang kelas, kantor dan peralatannya serta ruangan praktekum, disempurnakan agar bermanfaat bagi kegiatan belajar dan mengajar. Lihat Tabel IV-9.

2. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, besar peranannya dalam menentukan keberhasilan sektor lainnya. Menyadari hal tersebut, sejak Pelita I sampai dengan tahun ke dua Pelita IV pembangunan sektor pendidikan selalu diprioritaskan di Propinsi Maluku. Sudah banyak yang dibangun, baik sarana maupun prasarana pendidikan dengan dana yang cukup besar. Namun perlu disadari, belum seluruhnya permasalahan pendidikan di Maluku dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya permasalahan pendidikan, ditambah dengan kondisi geografis Daerah Maluku yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pada tahun pertama Pelita III (1979/1980) jumlah sekolah di Daerah Maluku, Sekolah Dasar 1.728, Sekolah Menengah Tingkat Pertama 164, Sekolah Menengah Tingkat Atas 71, dan Pendidikan Tinggi 6. Sedang pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) meningkat menjadi: Sekolah Dasar 2.015, Sekolah Menengah Tingkat Pertama 186, Sekolah Menengah Tingkat Atas 76, dan Perguruan Tinggi 7. Peningkatan jumlah sekolah-sekolah ini diikuti pula oleh meningkatnya jumlah murid dan guru.

Jika tahun 1979/1980 jumlah murid Sekolah Dasar 216.285 orang anak dengan guru sebanyak 7.260 orang, tahun 1983/1984 meningkat menjadi 284.209 orang murid dengan guru 10.634 orang. Rata-rata peningkatan murid dan guru selama Pelita III masing-masing sebesar 7,07% untuk murid dan 10,01% untuk guru setiap tahun. Pada tahun 1979/1980 jumlah murid Sekolah Menengah Tingkat Pertama 34.037 orang anak dengan guru sebanyak 2.387 orang, pada tahun 1983/1984 meningkat menjadi 55.212 orang murid dengan guru sebanyak 2.854 orang. Rata-rata peningkatan murid dan guru selama Pelita III adalah 12,85% untuk murid dan 4,56% untuk guru pada setiap tahun. Pada tahun 1979/1980, Perguruan Tinggi di Daerah Maluku mencatat 3.912 orang mahasiswa dengan 135 orang tenaga pengajar (dosen) tetap, pada tahun 1983/1984 meningkat menjadi 6.971 orang mahasiswa dengan 360 orang tenaga pengajar (dosen) tetap. Selama Pelita III terjadi peningkatan jumlah mahasiswa sebesar rata-rata 15,38% per tahun dan tenaga pengajar (dosen) tetap sebesar 27,79% per tahun.

Tahun 1979/1980 jumlah Sekolah Dasar 1.641 buah terdiri dari Sekolah Negeri 970 buah dan Sekolah Swasta 671 buah, atau dengan perbandingan 1,45 : 1. Pada tahun 1983/1984 jumlah sekolah menjadi 2.155 buah terdiri dari Sekolah Negeri 1.366 buah dan Sekolah Swasta 789 buah, atau dengan perbandingan 1,73 : 1.

Pada tahun 1979/1980 jumlah Sekolah Lanjutan Pertama 159 buah yang terdiri dari Sekolah Negeri 86 buah dan Sekolah Swasta 73 buah, atau dengan perbandingan 1,18 : 1. Pada tahun 1983/1984 jumlah sekolah menjadi 176 buah yang terdiri dari Sekolah Negeri 98 buah dan Sekolah Swasta 78 buah, atau dengan perbandingan 1,26 : 1. Pada

c. Education and Religious Institutes

For the purpose to improve religious life, beside general education, religious education has already been undertaken in forms of Madrasah (Islamic Primary School), Religious Teacher Education, and Religious Higher Learning (IAIN).

There is also continued improvement of religious education quality from Ibtidaiyah degree (Islamic Primary School) to Aliyah degree (Islamic Senior High School) together with adaptation steps with the general education. Such policy has been taken for the purpose of finding out an opportunity for a state-managed religious education from Ibtidaiyah degree (Basic Education); Tsanawiyah (Yunior High School) and Aliyah (Senior High School) whenever they have fulfilled the conditions. Development is also undertaken in physical facilities as in forms of educational buildings and class rooms, offices and equipments, and practice halls, to improve learning and teaching condition. See Table IV - 9.

Tabel / *Table IV — 9*

KEADAAN PERGURUAN AGAMA DI MALUKU PELITA III
RELIGIOUS INSTITUTE CONDITIONS IN MOLUCCA DURING PELITA III

No	Jenis Sekolah Ruang *Type of School*	Jumlah			
		Gedung Ruang *Building Classes*	Murid *Pupil*	Guru *Teacher*	
				Tetap *Regular*	Tidak Tetap *Part-timer*
1.	Madrasyah Ibtidaiyah Neg (MIN)/ *State-run Islamic Basic School*	1/12	284	12	1
2.	Madrasyah Ibtidaiyah Swasta (MIS)/ *Private Islamic Basic Scholl*	108/648	11.399	207	323
3.	Madrasyah Tsanawiyah Neg.(MTsN)/ *State Yunior High School*	7/35	1.282	40	43
4.	Madrasyah Tsnawiyah Swasta (MTsS)/ *Private Islamic Yunior High School*	35/111	3.483	73	273
5.	Madrasyah Aliyah Neg.(MAN)/ *State Islamic Senior High School*	1/10	305	10	21
6.	Madrasyah Aliyah Swasta (MAS)/ *Private Islamic Senior High School*	9/30	829	15	106
7.	Madrasyah Diniyah/ *Islamic Kindergarten*	18/87	2.361	5	37
8.	P G A N/ *State Islamic Teacher Education*	2/13	430	16	9
9.	P G A Swasta/ *Private Islamic Teacher Education*	3/10	370	2	42

2. Education

Success in educational sector development will become a decisive factor to decide the condition of other sectors' development. Aware of this fact, since Pelita I to the second year of Pelita IV the educational development was placed to the priority scale in the Province of Molucca. Yet it must be realized that not all of the educational problems can be solved complex condition of that educational problems in addition to the geographical condition of Molucca Archipelago, they need special handling.

The number of schools in the first year of Pelita III (1979/1980) in the Molucca Province were : Basic School 1,728; Yunior High School 164; Senior High School 71; and Higher Education 6. In the last year of Pelita III (1983/1984) the improvement became : Basic School 2,015; Yunior High School 186; Senior High School 76; and Higher Education 7. The increasing facilities were followed by the increase of pupils and teachers.

While in 1979/1980 the total number of Basic School pupils were 216,285 with 7,260 teachers, in 1983/1984 the figure became 284,209 with 10,634 teachers. The rate of increment during Pelita III was 7.07% for pupil and 10.01% for teacher annualy. In the period of 1979/1980 the total number of pupils of Yunior High Schools were 34,037 with 2,387 teachers. In 1983/1984 the number increased to 55,212 pupils and 2,854 teachers. The rate of increment for Yunior High School during Pelita III was annually 12.85% for pupils and 4.56% for teachers. In 1979/1980 Higher Education in the Molucca region recorded 3,912 students with 135 fulltime lecturers. The figures increased in 1983/1984 to become : 6,971 students and 360 fulltime lecturers. During Pelita III, the rate of change in student annually became 15.38% per year and 27.79% for fulltime lecturers.

The total number of Basic School buildings in 1979/1980 were 970 state schools and 671 private-owned, or in the ratio of 1.45 : 1. In 1983/1984 the figure became 2,155 divided between state school 1,366 and private 786, with the ratio of 1.74 : 1.

There were 159 Junior High Schools in 1979/1980 with composition of state schools 86 and private 73, with the ratio 1.18 : 1. It became 176 schools

tahun 1979/1980 jumlah Sekolah Lanjutan Atas 60 buah yang terdiri dari Sekolah Negeri 27 buah dan Sekolah Swasta 33 buah, atau dengan perbandingan 0,8 : 1. Pada tahun 1983/1984 jumlahnya menjadi 67 buah yang terdiri dari 34 buah Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 33 buah, atau dengan perbandingan 1,03 : 1. Pada tahun 1979/1980 jumlah Perguruan Tinggi 6 buah yang terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri 3 buah dan Perguruan Tinggi Swasta 3 buah, atau dengan perbandingan 1 : 1. Pada tahun 1983/1984 jumlahnya menjadi 7 buah yang terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri 4 buah dan Perguruan Swasta 3 buah, atau dengan perbandingan 1 : 0,75. Dari angka-angka perbandingan tersebut menunjukkan kencenderungan partisipasi dan peranan swasta dalam pembangunan pendidikan yang sangat positip.

Komposisi Sekolah Umum dan Sekolah Kejuruan Khusus pada Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun pada Sekolah Menengah Tingkat Atas dapat diberikan gambaran sebagai berikut: pada tahun 1979/1980, jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama sebanyak 164 sekolah. Perbandingan antara Sekolah Umum dengan Sekolah Kejuruan adalah 12,67 : 1. Pada tahun 1983/1984 jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama sebanyak 186, perbandingan antara Sekolah Umum dan Sekolah Kejuruan adalah 14,5 : 1. Ini berarti bahwa selama Pelita III terjadi peningkatan hanya pada Sekolah Umum, yaitu sebesar 3,44% per tahun.

Sekolah Menengah Tingkat Atas pada tahun 1979/1980 sebanyak 71 sekolah, dengan perbandingan antara Sekolah Umum dan Sekolah Kejuruan sebagai 0,97 : 1. Pada tahun 1983/1984 jumlah Sekolah Menengah Tingkat Atas sebanyak 76 sekolah dengan perbandingan antara Sekolah Umum dan Sekolah Kejuruan sebagai 1,24 : 1. Ini berarti bahwa selama Pelita III ada sebagian dari pada Sekolah Kejuruan yang ditiadakan atau diintegrasikan ke Sekolah Umum.

Pendidikan Taman Kanak-kanak merupakan pendidikan pra sekolah bagi anak-anak usia 4 - 6 tahun. Pada tahun pertama Pelita III (1979/1980) Sekolah Taman Kanak-kanak di Maluku sebanyak 130 buah yang diasuh oleh 247 orang guru. Jumlah murid yang ditampung sebanyak 6.756 orang anak.

Pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak menjadi sebanyak 174 buah dengan jumlah guru 349 orang yang menampung murid sebanyak 8.692 orang anak.

Selama Pelita III terjadi peningkatan baik jumlah sekolah, guru maupun muridnya masing-masing dengan rata-rata setahun sebesar 7,56% untuk sekolah, 9,03% untuk guru dan 6,50% untuk murid.

Angka ini diperkirakan meningkat lagi pada Repelita IV dengan penyebarannya yang lebih merata pada seluruh daerah Maluku.

Guna lebih meningkatkan mutu pembinaan anak-anak pada tingkat Taman Kanak-kanak, selama Pelita III juga diadakan penataran bagi para guru dan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak sebanyak 200 orang. Selain itu selama Pelita III diadakan pula alat permainan serta pembangunan sebuah Taman Kanak-kanak Pembina dan merehabilitasi sebuah gedung Taman Kanak-kanak Negeri.

Pendidikan Sekolah Luar Biasa, khusus disediakan bagi anak-anak yang tergolong cacat pisik maupun mental. Pendidikan Luar Biasa di Daerah Maluku selama Pelita III, dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik, terutama disebabkan belum tersedianya prasarana maupun sarananya. Kalaupun ada masih sangat terbatas baik jumlah maupun mutunya.

Di daerah Maluku belum terdapat Sekolah Luar Biasa Negeri. Yang ada hanya Sekolah Luar Biasa milik Swasta sebanyak 2 buah, yaitu sebuah di Maluku Utara dan sebuah lagi di Kotamadya Ambon. Untuk kedua Sekolah Luar Biasa tersebut tercatat murid sebanyak 85 orang.

a. Pendidikan Dasar

Jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar (7 - 12 tahun) pada tahun pertama Pelita III (1979/1980) di Daerah Maluku sebanyak 228.208 orang atau sebesar 16,67% dari jumlah penduduk Maluku secara keseluruhan. Pada tahun terakhir PELITA III (1983/1984) jumlah tersebut menjadi sebanyak 247.380 orang atau sebesar 16,13%. Pertambahan penduduk Usia Sekolah Dasar di Daerah Maluku selama PELITA III rata-rata sebesar 2,04% per tahun.

Jumlah murid Sekolah Dasar pada tahun pertama PELITA III (1979/1980) di Daerah Maluku tercatat sebanyak 216.285 orang atau sebesar 15,80% dari jumlah penduduk di Daerah Maluku secara keseluruhan, dan merupakan 94,78% dari jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar di daerah ini. Pada tahun terakhir PELITA III (1983/1984) jumlah tersebut menjadi sebanyak 284.209 orang atau sebesar 18,53% dari jumlah penduduk Maluku secara keseluruhan, dan merupakan 114,80% dari jumlah penduduk usia Sekolah Dasar.

Pertambahan murid Sekolah Dasar di Daerah Maluku selama PELITA III dilihat dalam hubungannya dengan penduduk Maluku

in 1983/1984, consisting of 98 state's and 78 private's, or in 1.26 : 1 ratio.

In 1979/1980 Senior High Schools numbered 60, consisting of 27 state-owned and 33 private's, in the ratio of 0.8 : 1. In 1983/1984 the total number bacame 67 schools where 34 state-owned and 33 private's in the ratio of 1.03 : 1.

In 1979/1980 there were 6 Higher Learning Institutes, consisting of 3 state's and 3 private's, with 1 : 1 ratio. In 1983/1984 it increased to 7 bodies i.e. 4 state's institutes and 3 private's in the ratio of 1 : 0.75.

The above figures show the tendency of private participation and roles positively in the educational development.

The general education schools and special vocational schools composition at Junior High School level or at Senior High School can be presented as follows : In 1979/1980 the total number of Junior High Schools were 164 schools. Comparison ratio between general school and vocational school is 12.67 : 1. In 1983/1984 the total number of Junior High School were 186, and the ratio became 14,5 : 1. This means that during Pelita III improvement only existed among general school i.e. ratio increment as much as 3.44% annually.

At the Senior High School level with total number of 71 in 1979/1980, the ratio between general schools and vocational schools was 0.97 : 1. In 1983/1984 the number became 76 and the ratio changed to 1.24 : 1. This means that during Pelita III there were vocational schools which became intergrated to general school or just stopped operation.

Kindergarten education is directed to educating children before formal Basic School years i.e. between 4-6 years old. In the first year of Pelita III (1979/1980) the total number of kindergartens in Molucca were 130 units led by 247 teachers. The total children enrolled were 6,756. In the last year of Pelita III the schools became 349 with 8,692 children enrolled. During Pelita III the rate of increment in preschool education was : 7.56% for buildings, 9.03% teachers and 6.50 children enrolled. The estimate shows that this figure will be higher during Pelita IV due to equal distribution of development of preschool education throughout the province.

For the purpose to improve children guidancy at the preschool level, during Pelita III training had also been given to teachers and schoolmasters totalling 200 persons. Besides, aid had also been given for the supply of toys, and construction of model preschools and rehabilitation of a state's preschool.

Handicapped children education is especially prepared for pupils suffering from mental retardation or physical form. In the whole Province of Molucca, such education is still not in a favourable condition, caused by lack of infrastructures and facilities. They are still in a very limited amount and at the lowest quality.

In the Province of Molucca there are only 2 privatemanaged handicapped children schools, 1 in North Molucca and the other in Ambon, with total regristration of 85 handicappeds. There is no state's school for this retarded group in the whole province.

a. Basic Education

The total number of school-age children (7-12) in the Molucca at the first year of Pelita II (1979/1980) were 228,208 children or 16.67% of the whole population. At the last year of Pelita III (1983/1984 the number became 247,380 or 16.13% of the whole population. The rate of increment was 2.04% per year during Pelita III.

Total number of basic school pupils in the Molucca Province at the first year of Pelita III (1979/1980) were 216,285 or 15.80% of the whole population and 94.53% of the whole number of those who were in school-age children. At the last year of those who were in school-age children. At the last year of Pelita III (1983/1984) the number increased to 284,209 or 18.53% of the whole population. Taken from the whole school-age children, the percentage was 114.80%.

The increasing Basic School pupils in the Molucca during Pelita III in relation with the whole population was in the rate of 4.06% annually, and in relation with total school-age children was 4.93% annually.

Based on the above picture, the rate of increment of basic school pupils during Pelita III in the Province of Molucca either in its relation with the whole number of population or in its relation with the number of school-age children was greater in compariton with the rate of increment of school-age children. This condition existed for instance since the third year of Pelita III (1981/1982) with total basic school pupils reached 104.33% from total school age children, while in the preceding year or at the second year of Pelita III the total number of basic school pupils was less than the total number of school-age children (less than 100%).

This mentioned condition is an indicator that since the third year of Pelita III (1981/1982) there were children or above the 7-12 years old who were enrolled in the school. See Table IV - 10.

secara keseluruhan rata-rata sebesar 4,06% per tahun dan bila dilihat dalam hubungannya dengan jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar di daerah ini, rata-rata adalah sebesar 4,93% per tahun.

Berdasarkan angka-angka tersebut nampaklah bahwa pertambahan murid Sekolah Dasar selama PELITA III di Daerah Maluku baik dilihat dalam hubungannya dengan jumlah penduduk secara keseluruhan maupun dalam hubungannya dengan jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar, adalah lebih besar bila dibandingkan dengan pertambahan penduduk Usia Sekolah Dasar. Keadaan ini terjadi terutama sejak tahun ketiga PELITA III (1981/1982) dengan jumlah murid Sekolah Dasar telah mencapai 104,33% dari jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun kedua PELITA III jumlah murid Sekolah Dasar lebih kecil (kurang dari 100%) dari jumlah penduduk Usia Sekolah Dasar.

Keadaan seperti yang disebutkan itu adalah merupakan indikator bahwa sejak tahun ketiga PELITA III (1981/1982) selain anak Usia Sekolah Dasar (7 - 12 tahun) terdapat pula sejumlah anak yang berusia 7 tahun maupun diatas 12 tahun yang merupakan murid pada Sekolah Dasar di daerah ini. Lihat Tabel IV-10.

Tabel / *Table IV — 10*

PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH, GURU, DAN MURID DI PROPINSI MALUKU TH 1979/1980 - 1985/1986 (S D)
DEVELOPMENT OF THE NUMBER SCHOOL, TEACHER AND PUPIL IN THE PROVINCE OF MOLUCCAS 1979/1980 — 1985/1986 (BASIC SCHOOL)

No	Tahun *Year*	Sekolah *School*	Guru *Teacher*	Murid *Pupil*
1.	1979/1980	1.641	7.274	220.209
2.	1980/1981	1.708	7.579	234.446
3.	1981/1982	1.781	8.078	247.891
4.	1982/1983	1.971	9.640	276.572
5.	1983/1984	2.155	10.789	293.555
6.	1984/1985	2.171	12.523	302.895
7.	1985/1986	2.220	12.108	306.352

b. Pendidikan SMTP

Tahun 1979/1980 jumlah murid Sekolah Menengah Tingkat Atas 17.212 orang murid dengan guru sebanyak 1.176 orang, pada tahun 1983/1984 jumlah murid meningkat menjadi 28.102 orang (kenaikan rata-rata sebesar 13,04% per tahun), sedangkan jumlah guru mengalami penurunan menjadi 984 orang (atau menjadi 83,67% dari jumlah guru pada tahun 1979/1980).

Pada tahun 1979/1980 (tahun pertama Pelita III), jumlah penduduk usia SMTP di Daerah Maluku sebanyak 97.710 orang atau sebesar 7,14% dari jumlah penduduk Maluku. Pada tahun 1983/1984 (tahun terakhir Pelita III), jumlahnya menjadi 109.500 orang atau sebesar 7,14%.

Selama Pelita III penduduk usia SMTP mengalami pertambahan rata-rata sebesar 2,89% per tahun. Pada tahun 1979/1980 jumlah murid SMTP di Maluku tercatat sebanyak 34.037 orang atau sebesar 2,49% dari jumlah penduduk Maluku, dan merupakan 34,83% dari jumlah penduduk usia SMTP.

Pada tahun 1983/1984 jumlah murid SMTP di Maluku tercatat sebanyak 55.212 orang atau sebesar 3,60% dari jumlah penduduk, dan merupakan 50,42% dari jumlah penduduk usia SMTP.

Selama Pelita III jumlah murid SMTP mengalami pertambahan rata-rata sebesar 12,85% per tahun. Apabila dilihat dalam hubungannya dengan jumlah penduduk Daerah maluku, maka murid SMTP selama Pelita III mengalami peningkatan sebesar 9,65% per tahun. Bila dilihat dalam hubungannya dengan jumlah penduduk usia SMTP, maka jumlah murid SMTP selama Pelita III mengalami peningkatan sebesar 9,68% per tahun. Lihat Tabel IV-11.

c. Pendidikan S M T A

Jumlah usia SMTA di Daerah Maluku pada tahun pertama Pelita III (1979/1980) sebanyak 83.965 orang atau sebesar 6,13% dari jumlah penduduk Maluku secara keseluruhan. Pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) mencapai 94.000 orang atau juga sebesar 6,13% dari jumlah penduduk.

Pertambahan penduduk usia SMTA selama Pelita III di Daerah Maluku sebesar 2,86% per tahun. Jumlah murid SMTA di Daerah Maluku pada tahun pertama Pelita III (1979/1980) tercatat sebanyak 17.212 orang atau sebesar 1,26% dari jumlah keseluruhan penduduk Maluku dan hanya merupakan 20,50% dari jumlah penduduk usia

b. Junior High School Education

In 1979/1980 the total number of Junior High School pupils were 17,212 with 1,176 teachers. In 1983/1984 the number increased to 28,102 with the rate of increment of 13.04% annually, while decreasing number appeared among teachers to 984 or 83.67% of the total number in 1979/1980.

In 1979/1980 (the first year of Pelita III), the total number of Junior High School age people in the Molucca province were 97,710 or 7.14% of the whole population. In 1983/1984 (the last year of Pelita III) the number became 109,500 or 7.14%.

During Pelita III, Junior High School Age people in creased at the rate of 2.89% annually. In 1979/1980 the total number of Junior High School pupils in the Molucca were 34,037 or 34.83% of the total number of Junior High School Age people and 2.49% of the whole Molucca population.

In 1983/1984 the total number of Junior High School pupils throughout Molucca were 55,212 or 3.60% of the whole population and 50.42% from the total number of Junior High School Age.

During Pelita III the total number of pupils in Junior High School increased with a rate of 12.85% annually. Seen in its relation with the whole population in the whole Molucca, the pupil total number increased by 9.65% annually, while seen from its relation with the total number of Junior High School Level Age people, during Pelita III the rate of increment was 9.68% yearly. See Table IV - 11.

Tabel / *Table IV - 11*

JUMLAH SEKOLAH, GURU DAN MURID DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1979/1980 - 1985/1986
TOTAL NUMBER OF SCHOOL, TEACHER AND PUPIL AND THE PROVINCE OF MOLUCCA, 1979/1980

No	Tahun *Year*	Sekolah *School*	Guru *Teacher*	Murid *Pupil*
1.	1979/1980	159	2.383	34.037
2.	1980/1981	162	2.265	38.757
3.	1981/1982	164	3.120	44.106
4.	1982/1983	170	3.391	48.972
5.	1983/1984	176	3.431	55.212
6.	1984/1985	196	3.736	61.586
7.	1985/1986	204	4.354	69.473

c. Senior High School Education

The total number of Senior High School age people in Molucca in the first year of Pelita III (1979/1980) were 83,965 or 6.13% of the whole population. At the end of Pelita III (1983/1984) it reached 94,000 or 6.13% of the whole population at the time.

The increase Senior High School age people during Pelita III in the Province of Molucca was 2.86% annually. The total number of pupils enrolled in the first year of Pelita III (1979/1980) were 17,212 or 1,26% of the whole population and only 20.90% of the total number of those who were in Senior High School age people.

Senior High School pupils during Pelita III increased at the rate of 3.96% annually. Seen from its relation with the total population number in the whole Molucca Province, the increment rate became 9.78% annually. In tis relation with the total number of Senior High School age people the percentage became 9.90% per year.

According to those pictures, it is clear that although Senior High School pupils increased every year throughout Pelita III, yet in comparison woth its relation to the whole population at the age of Senior High School it was still in lower point, i.e. less than 50% from those Senior High School level age people. See Table IV - 12.

d. Higher Learning

University of Pattimura

The total number enrolled to the end of Pelita III at the various faculties in the University of Pattimura were 4,765 students. Lecturing space needed actually must be ½ (4,765 x 2 M²) = 4,675 M², while space provided were only 3,450 M² at Poka Campus (not including 447.50 M² at Taman Makmur and 967.50 M² rented from the Regional Office of Education Ministry used by the Teaching Science Faculty.

If all faculty activities should be concentrated Poka Campus, actually the University of Pattimura still lacked 1,225 M² lecturing space. Beside those lecturing spaces, the University also needed various kinds of laboratories for the acceleration of its activities, together with other supporting facilities such as library, educational studio, practice workshop, drawing rooms, all

SMTA. Pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) tercatat sebanyak 20.102 orang atau sebesar 1,83% dari jumlah keseluruhan penduduk Maluku, dan merupakan 20,90% dari jumlah penduduk usia SMTA.

Pertambahan murid SMTA selama Pelita III, rata-rata sebesar 3,96% per tahun. Bila dilihat dalam hubungannya dengan jumlah penduduk Maluku secara keseluruhan, tingkat kenaikannya rata-rata sebesar 9,78% per tahun, atau bila dilihat dalam hubungannya dengan jumlah penduduk usia SMTA, tingkat kenaikannya rata-rata sebesar 9,90% per tahun.

Berdasarkan angka-angka tersebut, jelaslah walaupun jumlah murid SMTA di Daerah Maluku untuk setiap tahunnya selama Pelita III menunjukkan adanya peningkatan, namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMTA yang ada di daerah ini masih terlalu rendah (masih dibawah 50% dari jumlah penduduk usia SMTA). Lihat Tabel IV-12.

d. Perguruan Tinggi

Universitas Pattimura

Jumlah mahasiswa yang terdaftar sampai tahun terakhir Pelita III pada berbagai Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Pattimura sebanyak 4.765 orang. Luas lantai kuliah yang diperlukan seharusnya adalah seluas ½ (4.765 × 2 M^2) = 4.675 M^2. Luas lantai kuliah yang tersedia di Kampus Poka adalah seluas 3.450 M^2 (tidak termasuk 447,50 M^2 di Taman Makmur dan seluas 967,50 M^2 milik Kanwil. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan oleh Fakultas Keguruan sebagai pinjaman).

Apabila semua Fakultas harus melaksanakan kegiatan perkuliahannya di Kampus Universitas Pattimura di Poka, Universitas Pattimura masih mengalami kekurangan lantai kuliah seluas 1.225 M^2. Selain ruang kuliah, guna kelancaran kegiatan perkuliahan diperlukan pula beberapa jenis laboratorium, dan sarana penunjang lainnya seperti perpustakaan, studio pendidikan (TLRU), bengkel praktek dan ruang gambar, yang semuanya sudah dipusatkan di Kampus Poka kecuali laboratorium bahasa.

Guna kepentingan kemahasiswaan, didalam Kampus di Poka telah pula tersedia Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (Student Centre) seluas 680 M^2 dan Asrama Mahasiwa seluas 600 M^2.

Sarana penunjang lainnya yang terdapat di Kampus Poka antara lain seperti Gedung Percetakan, Kantor Pusat Data dan Informasi, Kantor BKS, dan Guest House.

Hingga saat ini seluruh kegiatan Universitas Pattimura belum sepenuhnya dipusatkan di Kampus Poka, terutama karena belum tersedianya Kantor Pusat sebagai pusat kegiatan administrasi Universitas (sementara ini kegiatan Kantor Pusat masih dilaksanakan di Kantor Pusat di Batu Gajah, Ambon).

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN)

Jumlah mahasiswa terdaftar pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Ambon pada tahun terakhir Pelita III tercatat sebanyak 171 orang. Luas lantai kuliah yang diperlukan harus tersedia adalah seluas 342 M^2. Namun hingga saat ini APDN belum memiliki bangunan khusus milik APDN. Bangunan yang dijadikan pusat kegiatan APDN merupakan gedung Badan Pendidikan dan Latihan Daerah di Poka.

Prasarana pendidikan yang tersedia adalah: ruang kuliah sebanyak 7 buah, ruang baca 1 buah, ruang perpustakaan 2 buah, dan kantor untuk kegiatan administrasi terdiri dari ruang Direktur 1 buah, ruang staf 3 buah, ruang tata usaha 1 buah, ruang tamu 1 buah dan sebuah ruang sebagai Aula.

Guna kepentingan dan pengembangan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri ini dimasa-masa mendatang, perlu diadakan atau dibangun sebuah Kampus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di kota Ambon.

Sekolah Tinggi Theologia (STT — GPM)

Jumlah mahasiswa terdaftar pada Sekolah Tinggi Theologia (STT—GPM) pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) sebanyak 230 orang. Luas lantai kuliah yang tersedia 5.600 M^2, yang terdiri dari 10 ruang kuliah dengan luas tiap ruangan 56 M^2. Selain itu juga tersedia sebuah Aula seluas ± 450 M^2 merupakan sarana pendidikan yang tersedia dalam Kampus STT—GPM Ambon.

Prasarana Kampus yang tersedia berupa asrama Mahasiswa Putra seluas 336 M^2 (daya tampung 100 orang) dan Asrama Putra seluas 126 M^2 (daya tampung 48 orang).

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang berkedudukan di Tulehu merupakan filial dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang. IAIN ini baru didirikan pada tahun 1981/1982 atau

Tabel / *Table IV — 12*

PERKEMBANGAN JUMLAH SEKOLAH, GURU DAN MURID DI PROPINSI MALUKU TH 1979/1980 - 1985/1986
(S M T.A)
DEVELOPMENT OF SCHOOL, TEACHER AND PUPIL IN THE PROVINCE OF MOLUCCA 1979/1980 — 1985/1986 (SENIOR HIGH SCHOOL)

No	Tahun *Year*	Sekolah *School*	Guru *Teacher*	Murid *Pupil*
1.	1979/1980	60	1.242	17.212
2.	1980/1981	62	1.380	19.830
3.	1981/1982	63	1.426	21.961
4.	1982/1983	62	1.567	25.267
5.	1983/1984	67	1.200	28.102
6.	1984/1985	67	1.747	31.154
7.	1985/1986	67	2.026	32.519

of which should be placed inside Poka Campus with the exeption of language laboratory.

For the sake of student interest, Poka Campus was also provided with a Student Centre measuring 680 M^2 and 600 M_2 of student accomodation.

Other supporting facilities in Poka Campus included a printing house, head office, data and information centre, BKS Office (Student Senate) and guest house.

Until today not all of the University's activities can be managed in Poka Campus, especially because there is still no Central Administration Office as the centre of administration activities of the university, which is still located in Batu Gajah, Ambon Municipality.

Public Administration Academy (APDN)

The total number of enrollment in Municipality of Ambon APDN at the end of Pelita III were 171 students. Lecturing space provided must be 342 M^2, but even until now APDN still has no building of their own. The building occupied for the whole APDN activities is owned by the Regional Education and Training Body at Poka.

Inside the borrowed building, lecturing facilities include 7 classroom, 1 reading room, 1 library room, administration office consisting of Director Room, staff room (3), administration room (1), guest room (1) and 1 aula/hall.

For the sake of APDN development, in the future the institute ought to occupy its own Campus in Ambon Municipality.

Theological High Learning (STT-GPM)

The total number of enrollment to the end of Pelita III (1983/1984) were 230 students. Lecturing floor measured 5,600 M^2 consist of 10 classrooms in 56 M^2 each. There is a meeting hall of about 450 M^2, together with male students dormitory about 336 M^2 (for about 100 students) and female boarding house 126 M^2 with 48 students capacity.

State Islamology Institute (IAIN), Ambon

IAIN Ambonlocated in Tulehu is a branch of IAIN Ujung Pandang, South Sulawesi. It started operation since 1981/1982 at the 3rd year of Pelita III.

The number of registered students were 575 in 1983/1984, showing that IAIN at that year at least needed 862.50 M^2 lecturing floor. Now there are 9 classrooms, a meeting hall, a library room, a students' mosque and an office building.

State Islamology Institute (IAIN), Ternate

Registered students in 1983/1984 at the end of Pelita III were 353 students. The institute provides 2 buildings with 6 classrooms for lecturing activities. Also there are 1 laboratory under construction, 1 library together with facilities as an office, a multipurpose hall, a lodging and 2 units of students' accomodation.

University of Sultan Chairun, Ternate

The University of Sultan Chairun is a registered private university, with total enrollment at the end of Pelita III (1983/1984) of 784 students. The University provides 12 classrooms and 1 library for its lecturing activities. For the sake of its future, the university still have no Campus of tehri own.

Theological Academy of Ternate

Enrollment at the end of Pelita III (1983/1984) numbered 93 students. The academy is a registered private institute. For its activities the academy









Rangkaian upacara peringatan Hari Koperasi yang dilaksanakan di Kota Ambon sempat terekam sebagaimana ditampilkan dalam foto. di halaman ini. Ketika itu Presiden Soeharto berkenan memberikan sambutan. Acara tersebut dihadiri oleh Menko Polkam, Surono, penasihat Presiden Bidang Militer, Kardono serta Pangdamar Maluku dan Gubernur.

A series of celebration ceremonies on Cooperative Day which were organized in Ambon. On this occassion President Soeharto availed himself of the opportunity to deliver his addres. Present in this ceremony were the Minister Co-ordinator for Political and Security Affairs, Mr. Surono, Advisor to the President on Military Affairs, Mr. Kardono, and Military Command of Molucca as well as the Governor.















Rekaman peristiwa kegiatan Penataran P4 di tingkat Propinsi tahun 1986/1987. Gambar lain adalah suasana penyambutan atas kunjungan isteri Mendagri didampingi isteri gubernur ke daerah. Nampak pula Kakanwil Kesehatan ketika memberikan imunisasi kepada Balita di Kotamadya Ambon.





Records on the activities of P4 upgrading (Guide to Enlightenment and Application of Pancasila) at provincial level in 1986/1987. Other pictures show the visit of the wife of the Minister of Home Affairs accompanied by the wife of the Governor to the region. Also seen, Head of the Health Office of the Province when giving immunization to under-five children in Ambon Municipality.

Menteri Agama Munawir Sadzali dan Ibu disambut Gubernur beserta Nyonya ketika menghadiri Sidang Raya DGI di Ambon. Foto lain menggambarkan suasana pelepasan Jemaah Haji oleh Gubernur dan beberapa kantor perbankan yang turut mendukung kelancaran pembayaran ONH.

The Minister of Religious Affairs, Mr Munawir Sjadzali MA, and wife were welcome by the Governor and wife when attending the Conference of DGI (Indonesian Church Council) in Ambon. Other pictures show the situation of seeing-off the mass of Haj Pilgrims by the Governor and some bank officers that help the payment procedure of ONH (Haj Pilgrimage Expenses).













Disamping industri besar seperti halnya plywood, di Maluku juga berkembang pesat industri kerajinan jenis kerang-kerangan. Termasuk industri pembuatan trasi, yang dikerjakan secara tradisional.

In addition to big industries such as plywood industry, there are also handicrafts industries that rapidly grow in Molucca. These handicrafts are the works of shell-fish, including the home-industry of fish preserves which are traditionally processed.













Sarana perhubungan udara dan laut seperti nampak dalam gambar, memang cukup menonjol di daerah propinsi kepulauan ini. Foto di atas (kanan) beberapa Menteri Kabinet Pembangunan IV sempat berdialog di atas sebuah ferry.

The facilities of air and sea communication as shown on the pictures are fairly good in the province of this archipelago. Upper right photoes illustrate a number of Ministers of Development Cabinet IV involved in a dialogue on a ferry.









Kerajinan cengkeh, kain tenun tradisional dan holtikultura sebagaimana nampak pada gambar, adalah hasil kegiatan PKK. Tentu saja dalam hal ini keterlibatan Kanwil Perindustrian dan Pemda Tingkat I Maluku besar sekali peranannya.

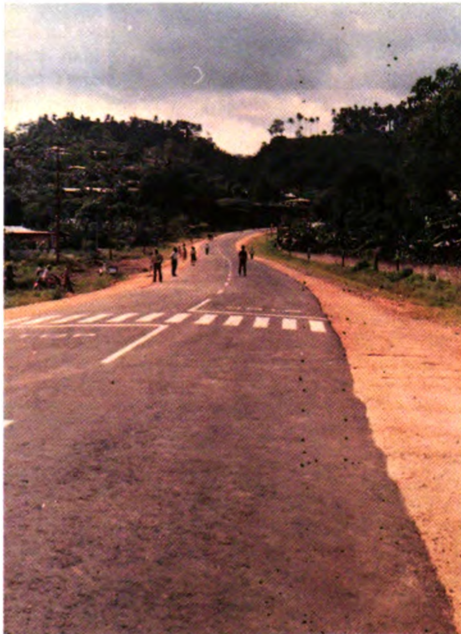
The creativity to cultivate clove, traditionally woven cloth and horticulture as reflected on the pictures are the works of PKK activities (Promotion of Family Welfare). In such a programme the role of Industrial Office in the Province and the Regional Administration of Molucca Province is very important.



Jalan dan jembatan sebagai sarana transportasi dan perhubungan, besar peranannya dalam menunjang sektor perekonomian dan sektor lainnya. Dalam hubungan inilah Pemda Maluku gencar melaksanakan pembangunannya seperti nampak pada gambar.

Roads and bridges as means of transportation and communication have a vital role to support economic and other sectors. In view of this concern, the Regional Administration Molucca actively carries out the development of these facilities as illustrated on the pictures.

















pada tahun ketiga Pelita III.

Jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun terakhir Pelita III (tahun 1983/1984) sebanyak 575 orang. Ini berarti IAIN ini memerlukan lantai kuliah pada tahun yang sama seluas 862,50 M².

Ruang kuliah yang tersedia untuk menampung jumlah mahasiswa tersebut saat ini sebanyak 9 ruangan. Selain itu terdapat sebuah Aula, sebuah perpustakaan, sebuah mesjid, dan sebuah ruang kantor.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Jumlah mahasiswa terdaftar pada Institut Agama Islam Negeri di Ternate pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) sebanyak 353 orang. Guna kelangsungan kegiatan perkuliahan tersedia 2 buah bangunan dengan 6 buah ruang kuliah. Selain itu pada IAIN Ternate juga terdapat sebuah laboratorium yang sementara dibangun, dan sebuah perpustakaan. Prasarana dan sarana penunjang lainnya adalah sebuah ruang kantor, sebuah ruangan serbaguna, serta sebuah wisma dan 2 buah Asrama mahasiswa.

Universitas Sultan Hairun (Ternate)

Universitas Sultan Hairun berstatus Swasta Terdaftar. Jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) sebanyak 784 orang. Untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan Universitas Sultan Hairun menggunakan ruang kuliah sebanyak 12 ruangan, dan sebuah perpustakaan. Hingga saat ini Universitas Sultan Hairun belum memiliki Kampus bagi pengembangannya dimasa yang akan datang.

Akademi Theologia Ternate

Jumlah mahasiswa terdaftar pada tahun terakhir Pelita III (1983/1984) sebanyak 93 orang. Akademi Theologia Ternate berstatus Swasta Terdaftar.

Guna melaksanakan kegiatan perkuliahannya Akademi Theologia Ternate menggunakan 4 buah ruangan. Selain ruang kuliah pada Akademi ini juga terdapat sebuah perpustakaan.

Seperti halnya dengan Universitas Sultan Hairun, Akademi Theologia Ternate belum memiliki tanah yang penting artinya bagi pengembangan dimasa yang akan datang. Lihat Tabel IV-13.

Berdasarkan angka-angka (ratio) yang ada, dipandang secara keseluruhan Daerah Maluku, jumlah guru yang ada pada setiap jenjang atau tingkat pendidikan dapat dikatakan, "sudah memadai".

Namun apabila dipandang dari sudut penyebarannya pada sekolah-sekolah yang tersebar pada Daerah Tingkat II dirasakan masih sangat tidak memadai (untuk selanjutnya ikutilah ratio Guru dan Murid menurut jenjang atau tingkat pendidikan pada masing-masing Daerah Tingkat II). Sebelumnya berikut ini akan diketengahkan pula mengenai perkembangan jumlah sekolah selama Pelita III serta penyebarannya pada Daerah Tingkat II. Lihat Tabel IV-14.

e. Kebudayaan

Pembangunan di sektor kebudayaan Propinsi Maluku, dititikberatkan pada penataan kembali prasarana serta peningkatan kemampuan pengelolaan, baik secara teknik administrasi maupun secara teknis operasional.

Dalam memberikan perlindungan peninggalan sejarah kepurbakalaan serta pengembangan museum, pada Pelita III di Maluku telah dilaksanakan pemugaran 5 buah bangunan peninggalan sejarah, pengamanan dan pemeliharaan 40 situs benda-benda bersejarah, perluasan museum propinsi 1.116 m², pengadaan lokasi museum 1.130 potong, bantuan kepada 2 buah museum daerah, rehabilitasi Kedaton Sultan Tidore dan peningkatan organisasi serta penambahan sarana fasilitas penunjang.

Mengembangkan seni budaya di Maluku selama Pelita III, diarahkan untuk mengembangkan, menyebarluaskan, membina, memelihara serta memanfaatkan kesenian daerah, termasuk kesenian daerah yang hampir punah. Kegiatannya antara lain, dengan pembangunan sebuah gedung olah seni, pembinaan sosiodrama kepada 1.693 desa dan pemberian bantuan berupa alat kesenian kepada kecamatan dan daerah transmigrasi.

Pengembangan kebahasaan, kesusastraan, perbukuan dan perpustakaan selama Pelita III di Propinsi Maluku, ditujukan untuk meningkatkan jumlah bahan bacaan berupa buku-buku dan pembinaan kebiasaan membaca, serta penelitian bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah.

Untuk menunjang program tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi: pengadaan buku untuk perpustakaan propinsi sebanyak 15.400 eksemplar, perpustakaan Daerah Tingkat II sebanyak 13.750 eksemplar, perpustakaan keliling sebanyak 11.450 eksemplar, perpustakaan sekolah 6.700 eksemplar, dan perpustakaan desa sebanyak 1.000 eksemplar.

provides 4 classrooms and 1 library. Like the University of Sultan Chairun, the Theological Academy of Ternate still has no land property, an important thing for its future. See Table IV - 13.

Tabel / *Table IV — 13*

JUMLAH DOSEN DAN MAHASISWA DI MALUKU SELAMA PELITA III, DIPERINCI PER JENIS PERGURUAN TINGGI PER DATI II
TOTAL NUMBER OF LECTURER AND STUDENT IN MOLUCCA DURING PELITA III, BY TYPE AND BY DISTRICT

P.T *Higher Learning*	Daerah *Region*	Jumlah Dosen/Mahasiswa Pada Tahun : *Number of Lecturer/Student at The Year* 1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Unpatti	Kodya Ambon	112/3.090	163/3.347	199/3.805	242/4.291	325/4.765
A P D N	Kodya Ambon	5/117	5/40	5/156	6/165	6/171
STT GPM	Kodya Ambon	9/151	10/171	12/180	15/210	18/230
IAIN	Malteng	—	—	0/375	0/450	0/575
IAIN	Malut	4/189	4/273	5/282	5/295	5/353
ST—GMIH	Malut	5/64	5/73	5/80	6/88	6/93
Perguruan Tinggi	M a l u k u	135/3.912	187/4.408	226/5.401	274/6.141	360/6.971

Catatan : Dosen (tenaga pengajar) dalam hal ini khusus Dosen tetap.
Note : Lecturer in this case is Fulltime Lecturer.

Based on the presented figures, as a whole throughout the region of Molucca, the total number of teachers in every level of education can be said as "adequately provided". Yet from its condition of distribution to the whole schools in the district regions, we can find its inequity (See the ratio of Teacher and Pupil according to its educational level in every district). Table IV-14 shows the development of school number during Pelita III and its distribution to the district regions. See Table IV - 14.

Tabel / *Table IV — 14*

RATIO GURU TERHADAP MURID DAN DOSEN TERHADAP MAHASISWA, SELAMA PELITA III, DIPERINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
RATIO OF TEACHER TO PUPIL AND LECTURER TO STUDENT, BU EDUCATIONAL LEVEL

Tahun *Year*	S D *High School*	S M T P *Junior High School*	S.M.T.A. *Senior High School*	P.T. *Higher Learning*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1979/1980	1 : 30	1 : 14	1 : 15	1 : 29
1980/1981	1 : 27	1 : 15	1 : 14	1 : 24
1981/1982	1 : 30	1 : 17	1 : 15	1 : 24
1982/1983	1 : 29	1 : 14	1 : 16	1 : 23
1983/1984	1 : 27	1 : 20	1 : 23	1 : 20

Sumber Data : BAPPEDA Dati I Maluku
Source : Regional Planning Board, Province of Molucca.

e. Culture

Cultural development in the Province of Molucca is stressed on the management of infrastructures and improvement of management ability, in administration or in operational undertakings.

To give protection to prehistoric remains and rehabilitation of musem, in the period of Pelita III in Moluccas, reconstruction had been done to 5 historic buildings, protection and care for 40 historic relics, expansion of provincial museum to 1,116 M², supply and care of 1,130 pcs of museum property, support to 2 local musea, rehabilitation of the Tidore Sultanate Palace, organizational management improvement with addition of supporting facilities.

The development of arts and culture in Molucca during Pelita III was directed towards expansion, distribution, guidance, tending and use of regional arts including the almost disappearing arts. Activities among others include construction of 1 art house, sociodrama training for 1,693 villages, and aids in form of equipments to each sub-district and transmigration areas.

3. Promotion of The Younger Generation

Efforts to promote and to develop the younger generation in the Province of Molucca are directed toward a united and coordinated approach among related institutions and organizations. Under such united and coordinated

Sedangkan untuk menyelamatkan, pemeliharaan dan pengembangan warisan di Propinsi Maluku beraneka corak, kegiatan yang dilaksanakan selama Pelita III meliputi: penelitian sejarah/kepurbakalaan pada area kebudayaan seperti di Tanimbar, Ternate, Tidore dan Kepulauan Kei. Dan diadakan pula penelitian, pengolahan dan dokumentasi kesenian tradisional yang hampir punah untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Untuk bahasa, diteliti pula agar dapat mengembangkan sastra dan bahasa Indonesia.

3. Generasi Muda

Upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda di Propinsi Maluku, pembinaan dan pengembangannya, diarahkan penanganan yang terpadu dan terkoordinasi secara baik antar instansi dan organisasi yang ada di daerah Maluku. Dengan keterpaduan dan koordinasi yang konsepsional, dapat tercipta iklim yang sehat di kalangan generasi muda dalam mengembangkan dan menyalurkan kreativitasnya secara bertanggungjawab.

Sejalan dengan hal itu, maka pengembangan wadah-wadah penyalur inspirasi muda melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi, organisasi fungsional pemuda seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Olah Raga dan lain sebagainya dirasakan telah semakin berfungsi dengan baik.

Dalam pembinaan ketrampilan bagi generasi muda di daerah ini selama Pelita III telah dilaksanakan berbagai latihan ketrampilan di bidang industri (1.912 orang), kewiraswastaan (3.342), pertanian (2.157 orang), kelautan (588 orang).

Untuk menanam rasa kesadaran berbangsa dan bernegara kepada para pemuda selama Pelita III telah diadakan latihan-latihan dan penataran P4 serta keikutsertaan dalam pendidikan politik baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional sebanyak 350 orang pemuda.

Untuk meningkatkan pengenalan generasi muda terhadap Sejarah Perjuangan Bangsa khususnya di Daerah Maluku, selama Pelita III telah dilaksanakan kegiatan Lomba Gerak Jalan Patriotisme yang mengarah pada bentuk "Napaktilas" dari beberapa Pahlawan Nasional yang berasal dari daerah ini. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda sebanyak 157 orang.

Disamping itu untuk meningkatkan Patriotisme dan Idealisme, pemuda di daerah ini telah diikutsertakan pula dalam program pertukaran pemuda antar propinsi selama Pelita III sebanyak 20 orang, dan untuk pertukaran pemuda antar negara (dalam hal ini antar negera ASEAN maupun dengan Canada) telah diikuti oleh pemuda dari daerah ini sebanyak 16 orang.

Usaha lainnya yang dilakukan dalam rangka pembinaan generasi muda di daerah ini, juga melalui kegiatan pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi di kalangan pemuda dalam bentuk PORSENI baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat regional dan tingkat nasional.

Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Maluku meliputi beberapa jenis usaha yang diselenggarakan oleh beberapa Departemen, sebagai berikut: Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Departemen P dan K melalui program pembinaan dan pengembangan masyarakat yang meliputi kegiatan belajar di bidang Pendidikan Dasar Luar Sekolah, dan Pendidikan Mata Pencaharian termasuk Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (PLSM).

Selama Pelita III kegiatan yang dilaksanakan serta hasil yang dicapai adalah: Kegiatan Kejar Pendidikan Dasar bagi 87.620 orang anggota masyarakat atau sebesar 58,35% dari yang ditargetkan pada awal Pelita III sebanyak 150.160 orang; Kegiatan Kejar PKK bagi 22.848 orang anggota masyarakat atau sebesar 42,51% dari jumlah yang ditargetkan pada awal Pelita III sebanyak 53.750 orang; Kegiatan Kejar Kejuruan bagi 6.840 orang anggota masyarakat atau sebesar 39,63% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 17.260 orang; Kegiatan yang diarahkan pada pembinaan para Pembina Pendidikan Dasar bagi 500 orang atau sebesar 39,22% dari yang ditargetkan sebanyak 1.275 orang; Kegiatan Pembinaan para Pembina PKK bagi 220 orang atau sebesar 29,33% dari target sebesar 750 orang; Kegiatan melalui SBPKM yang berhasil membina sebanyak 230 orang anggota masyarakat atau sebesar 40,0% dari yang ditargetkan pada awal tahun Pelita III sebesar 575 orang; Melaksanakan kegiatan PLSM bagi 395 orang anggota masyarakat atau sebesar 31,98% dari yang ditargetkan sebesar 1.235 orang.

Selain kegiatan-kegiatan tadi selama Pelita III melalui Pembinaan Pendidikan Masyarakat juga telah berhasil dibentuk kelompok Kejar Usaha sebanyak 100 kelompok, serta dibangun dan diperluasnya 4 unit SKB berikut pengadaan peralatannya.

Pendidikan Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan melalui program pendidikan tenaga medik, pendidikan tenaga perawatan, dan pendidikan tenaga sanitasi, gizi yang dilaksanakan pada 3 buah Sekolah Perawatan Kesehatan yang ada di

approach, a sound and favourable climate can be created among the younger generation in the activities to promote and to direct their creativity in an acceptable manner.

In this way the development of chanellng bodies for the younger generation inspiration such as the Intra School Student Organization (OSIS) and students in Higher Learning Institutes, Youth functional organizations as the National Committe for Indonesian Youth (KNPI), Pramuka (Scouts) Movement, Adolescent Group (Karang Taruna), Sport Groups etc has shown to function better.

Vocational training among the younger generation in this region during Pelita III had been conducted in various fields such as industry (1,912 trainees), entrepreneur ship (3,342 trainees), agriculture (2,157 trainees) and marine fishery (588 trainees).

To implant nationalism and citizenship awareness among the younger generation, guidance had been organized during Pelita III such as P4 cources (Guide to Enlightment and Application of Pancasila) and participation in political education at local level as well as national level, which was followed by 350 young men.

To promote better insight among the young people on the national struggle history, especially in Molucca region, steps had been taken in form of road marching competitions in patriotism spirit, arranged to relive the national heroes' former struggles in this region. This activity involved 157 young people.

Besides, in promoting their patriotism spirit and idealism, young people in this region also took part in international youth exchange, interprovince exchange involving 20 persons, and ASEAN as well as Canada youth exchange involving 16 young people.

Other endeavors include sport activity and creativity among those youth in form of PORSENI (Sport and Art Week) in regional as well as national levels.

Activities of non-formal education in Molucca among others are organized by some departments such as : public education by Education and Cultural Affair Departement with programmes to guide and develop people's education i.e. with people's basic education classrooms, and work-oriented education administered by PLSM (Non-formal public education).

During Pelita III, activities and results achieved include : Basic Educational Study Group for 87,620 people or 58.35% of the expected target at the beginning of Pelita III (150,160 people); Family Welfare Promotion (PKK) Study Group for 22,848 people or 42.51% of the expected target at the beginning of Pelita III (53,750 members); Vocational Study Group for 6,840 members or 39.63% of the total target of 17,260 members; upgrading of tutors in Basic Education for 500 members or 39.22% of the target number of 1,275; upgrading of tutors of Family Welfare Education for 200 members or 29.33% of 750 members targetted; 230 members enrolled via SBPKM education or 40.0% of the total target of 575 at the beginning of Pelita III; realization of PLSM (Non formal Public Education) for 395 people or 31.98% of the target number (1,235 people).

Beside all the above-mentioned activities, during Pelita III public education promotion had also created 100 groups of business study group (in small trade) and construction and expansion of 4 units SKB complete with equipments.

Public Education administered by the Department of Health includes medical workers training, paramedics, sanitation-workers, nutrition, which are arranged in 3 health care schools in the Province of Molucca.

Out of the three health care schools mentioned, 2 are administered by the Department of Health and 1 by Health Division of Regional Military Authority XV Pattimura. To fulfill the lack of health workers in the Molucca, those three health care schools during Pelita III had trained 314 medical workers, comprising of : SPK Ambon 151 workers, SPK Ternate 117 workers and SPK Kesdam XV Pattimura 46 workers.

In view of the expansion of health care duties in the whole regiom, especially with the existence of PUSKESMAS (PUBLIC HEALTH CENTRE) throughout the region in relation with the lack of health care workers, this medical education ought to be extensified and expanded either through medical schools mentioned or by direct guidance in health care to the villagers throughout the region.

Public Education administered by the Department of Industry is directed to promote knowledge and skills in industrial sector and especially for young people, in cooperation with KNPI (the National Committee for Indonesian Youth) or AMPI (Young Generation for Indonesian Development) and the regional administration.

Realization during Pelita III included 23 times training enrolling 571 trainees with description as follows : training for Industrial Entrepreneurs/Young Handicrafts in cooperation with KNPI/AMPI Molucca Region with 120 trainee (Young people); training for puny entrepreneurs in industrial sectors with 451 enrollment.

Daerah Maluku.

Ketiga Sekolah Perawat Kesehatan yang ada itu dua buah dikelola oleh Departemen Kesehatan, dan sebuah lagi dikelola oleh Kesdam XV Pattimura. Guna memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di daerah Maluku, melalui ketiga sekolah kesehatan tersebut selama Pelita III telah dididik sebanyak 314 orang tenaga kesehatan yang diperinci sebagai berikut: SPK Ambon sebanyak 151 orang, SPK Ternate 117 orang, dan Kesdam XV Pattimura sebanyak 46 orang.

Mengingat semakin meluasnya tugas-tugas pelayanan kesehatan serta terbatasnya tenaga kesehatan untuk melayani PUSKESMAS yang tersebar di daerah ini, maka guna mengatasi permasalahan khususnya yang berhubungan dengan kekurangan tenaga kesehatan, pendidikan kesehatan ini perlu terus dibina dan dikembangkan baik melalui sekolah perawatan maupun secara langsung menyelenggarakan pendidikan kesehatan pada masyarakat di daerah pedesaan.

Pendidikan Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian melalui program Pendidikan dan Latihan yang bertujuan mendidik dan membina pengetahuan dan ketrampilan masyarakat baik sebagai pengusaha maupun sebagai pemuda (secara bekerjasama dengan organisasi pemuda seperti KNPI atau AMPI di Daerah Maluku).

Selama Pelita III telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan sebanyak 23 kali dengan jumlah anggota masyarakat sejumlah 571 orang dengan perincian sebagai berikut: Pendidikan Pengusaha Industri/Pengraiin Muda (secara bekerjasama dengan KNPI/AMPI di Daerah Maluku) sebanyak 120 orang pemuda; Pendidikan dan Latihan bagi para pengusaha industri tergolong ekonomi lemah sebanyak 451 orang pengusaha.

Sejalan dengan lajunya pembangunan di sektor industri terutama yang akan diwujudkan dalam Repelita IV, maka kegiatan pendidikan dan latihan semacam ini perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Pendidikan Kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial melalui Pembinaan Kesejahteraan Sosial, terutama terhadap pemuda putus sekolah dan yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Di daerah Maluku masih terdapat sebanyak 221.886 orang anggota masyarakat (termasuk pemuda/pemudi) yang tergolong penganggur, maka untuk mengatasi hal ini Departemen Sosial Kantor Wilayah Maluku selama Pelita III telah 7 kali melakukan kegiatan pendidikan kemasyarakatan di pusat pendidikan di Lateri Ambon terhadap sebanyak 350 orang pemuda/pemudi di daerah ini.

4. Kesehatan dan KB

a. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Dalam mempertinggi taraf kesehatan dan kesejahteraan rakyat, Propinsi Maluku melaksanakan pembangunan-pembangunan kesehatan disesuaikan dengan sistem Kesehatan Nasional. Maka penyediaan prasarana dan sarana kesehatan diarahkan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan secara merata dan menjangkau masyarakat sampai kepedesaan.

Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dilaksanakan sejak Pelita I hingga tahun 1985 sudah mencapai jumlah 102 buah yang dipimpin oleh 54 dokter. Bila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan Puskesmas yang ada pada tahun 1985, berarti 1 Puskesmas dapat melayani 15.857 orang.

Berarti ada peningkatan yang berarti bila dibandingkan dengan jumlah Puskesmas pada Pelita I yang merealisir pembangunan baru Puskesmas sebanyak 41 buah. Sedangkan pada Pelita II jumlah Puskesmas sebesar 87 buah. Pada Pelita III pembangunan Puskesmas lebih ditingkatkan lagi pada akhir Pelita III jumlah Puskesmas 101 buah dan ini menunjukkan beberapa kecamatan telah memiliki lebih dari 1 buah Puskesmas. Ditambah beberapa buah lagi Puskesmas Keliling.

Dalam upaya agar lebih mendekatkan dan meratakan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa, di Propinsi Maluku telah ditingkatkan cakupan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu yang baru direalisir pada Pelita II sebanyak 137 buah. Sedangkan pada Pelita III meningkat menjadi 196 buah, dan lebih ditingkatkan lagi pada Pelita IV (tahun 1984 - 1985) hingga mencapai 325 Puskesmas. Lihat Tabel IV-15.

Sebagaimana lazimnya kegiatan Puskesmas memberikan pelayanan seperti pengobatan, pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, tapi di Propinsi Maluku sampai dengan Pelita IV tahun ke—III telah ditingkatkan fungsi Puskesmas untuk memberikan pertolongan pertama dengan menambah tempat perawatan sebanyak 18 buah Puskesmas dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 329 buah.

Untuk menanggulangi komunikasi yang sulit karena letak geografis dari wilayah Propinsi Maluku yang tidak menguntungkan, pengadaan alat komunikasi bagi Puskesmas-puskesmas terpencil maupun rumah sakit setiap Kabupaten diprioritaskan. Hal ini berguna untuk monitoring

In accordance with the acceleration of development in industrial sector, especially with realization of plans during Repelita IV, this kind of education and training should be expanded and improved.

Public Education administered by the Social Affair Department through guidance to social welfare is especially directed for dropped-out; who are still in unemployment. Including young people (male and female), there were 221,886 unemployeds throughout Molucca. To solve this condition during Pelita III, the Regional Office of the Social Affair Department had conducted 7 times young people social affair training at Lateri Ambon, enrolling 350 young people, males and females.

4. Health and Family Planning

a. Infrastructure and Facilities in Health Affairs

To step up the degree of people's health and welfare, the regional administration of Molucca has realized health service development in accordance with the national system of health service. Availability of infrastructures and facilities in health service are directed to promote the ability to give equal service, reaching the whole population to the remotest areas.

The construction of PUSKESMAS (Public Health Centres) since Pelita I to 1985 had reached 102 units with 54 doctors. To compare with the total population, in 1985 each PUSKESMAS was directed to serve 15,857 people.

Construction by Pelita is as follows : Pelita I : 41; Pelita II : 87; and improvement in development in Pelita III resulting in the total construction of 101 PUSKESMAS. These data show that every sub-district already has 1 PUSKESMAS, to be added with PUSKESMAS mobile-units.

To promote health services for remote villages in the province of Molucca, improvement had been effected with expansion of auxiliary PUSKESMAS. In Pelita II it totalled 137 centres. In Pelita III the development increased to become 196 centres, and reached a total of 325 centres in Pelita IV (1981/1985). See Table IV - 15.

Tabel / *Table IV — 15*

SARANA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU PROPINSI MALUKU TAHUN 1984 - 1985
PUBLIC HEALTH CENTRE AND AUXILIARY PUBLIC HEALTH CENTRE IN THE PROVINCE OF MOLUCCA, 1984 — 1985

Kabupaten/Kotamadya *District/Municipality*	Puskesmas *Public Health Centres* Jumlah *Total*	Puskesmas *Public Health Centres* Dipimpin dokter *Led by Doctor*	Pembantu *Auxiliary Puskesmas*
Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	17	6	70
Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	35	20	100
Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	11	4	45
Maluku Utara/ *North Moluccas*	24	12	89
Kodya Ambon/ *Ambon Municipality*	15	12	21
M a l u k u/*Moluccas*	102	54	325

In general, Puskesmas service is outlined in medical services as cure, prevention and protection of health. But in the Province of Molucca until Pelita IV in the third year, Puskesmas function had been improved with First Aid with 18 Puskesmas addition with 392-bed capacity.

To solve communication problems due to geographical condition of Molucca, priority had been given for communication equipments to connect the remotest Puskesmas and also to the district hospitals. The equipments were useful to monitor and to quickly handle emergency cases. For this purpose also, in the third year of Pelita IV 35 units of telecommunication radio have been provided for PUSKESMAS to increase coverage.

In Pelita I the number of hospitals in Molucca were 4 with total bed capacity of 434. This condition needed rearrangement, rehabilitation and additional rooms, including additional new hospitals in the province and district levels.

Because of the new construction and rehabilitation, in Pelita II the number became 5 with 500-bed capacity.

In Pelita III the number became 8 hospitals with 616 beds owned by the state, military hospitals numbered 9 with 458 beds, also private owned hospital in balanced number: 7 hospitals with 398 beds. Maternity hospitlas in the province numbered 4, owned by private organizations. See Table IV - 16.

dan menanggulangi dengan cepat keadaan yang bersifat darurat. Untuk maksud tersebut, pada Pelita IV tahun ke—III telah ditingkatkan jangkauan serta komunikasi melalui penambahan sarana radio telekomunikasi sebanyak 35 buah untuk setiap Puskesmas.

Sejak Pelita I jumlah rumah sakit di Propinsi Maluku 4 buah dengan kapasitas, tempat tidur 434 buah. Kondisi ini memerlukan penataan kembali, rehabilitasi dan penambahan bangsal termasuk Rumah Sakit Propinsi dan Kabupaten. Karena ada penambahan pembangunan rumah sakit baru serta melengkapi yang sudah ada, pada Pelita II jumlah rumah sakit menjadi 5 buah dengan kapasitas tempat tidur 500 buah.

Dalam masa Pelita III, jumlah rumah sakit sudah berkembang mencapai 8 buah dengan kapasitas tempat tidur 616 buah, milik pemerintah. Sedangkan rumah sakit ABRI berjumlah 9 buah dengan kapasitas tempat tidur 458 buah, dan untuk jenis rumah sakit milik swasta juga jumlahnya agak berimbang yaitu sebanyak 7 buah dengan kapasitas tempat tidur 398 buah. Rumah bersalin di Propinsi Maluku milik swasta berjumlah 4 buah. Lihat Tabel IV-16.

b. Health Workers Availability

Various development of health service facilities ought to be followed by fulfilment and distribution of medicalworkers to improve and equate service in medical care for the people.

Availability of medical workers in the Province of Molucca during Pelita I until nowadays is still increasing. While in Pelita I specialist doctors amounted to only 1 person, in Pelita II they already became 5 doctors. In Pelita III the figure increased to 11 doctors, to the third year of Pelita IV became 13 persons.

General physicians in Pelita I amounted to 46, In Pelita II became 89 doctors, Pelita III to 110 doctors and increased to 112 doctors in the third year of Pelita IV.

Dentists (doctor) in Pelita I were just 4 persons, in the third year of Pelita IV they amounted to 17 persons.

Tabel / *Table IV — 16*

JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH, ABRI, SWASTA DAN RUMAH BERSALIN DI PROPINSI MALUKU TAHUN 1982 - 1985
TOTAL NUMBER OF HOSPITALS OWNED BY THE STATE, MILITARY, PRIVATE ORGANIZATION AND MATERNITY HOSPITAL IN 1982 - 1985

Kabupaten/Kodya *District/Municipality*	Pemerintah *State*		ABRI *Military*		Swasta *Private*		Rumah Bersalin *Maternity Hospitals*
	R S *Hospital*	T T *Bed*	R S *Hospital*	T T *Bed*	R S *Hospital*	T T *Bed*	
Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	1	70	1	25	5	360	2
Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	4	136	1	25	—	—	—
Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	1	50	—	—	—	—	—
Maluku Utara/ *North Moluccas*	1	60	3	101	1	—	1
Kodya Ambon/ *Ambon Municipality*	1	300	4	307	1	38	1
Maluku / *Moluccas*	1985:8	616	9	458	7	398	4
	1984:8	616	9	458	7	398	4
	1983:8	616	9	458	3	325	4
	1982:8	616	9	458	3	325	4

b. Pengadaan Tenaga Kesehatan

Berbagai kegiatan pembangunan sarana kesehatan, juga perlu diikuti dengan pemenuhan dan penyebaran tenaga kesehatan guna meningkatkan dan meratakan pelayanan kesehatan.

Pemenuhan tenaga kesehatan berupa dokter dan para medis, di Propinsi Maluku Pelita I sampai sekarang terus meningkat. Dalam Pelita I untuk Dokter Ahli berjumlah 1 orang, hingga Pelita II meningkat menjadi 5 orang. Sedangkan Pelita III juga meningkat mencapai 11 orang, dan pada Pelita IV tahun ke—III telah menjadi 13 orang.

Dokter Umum yang sejak Pelita I hanya berjumlah 46 orang, pada Pelita II bertambah hingga 89 orang. Dalam Pelita III untuk tenaga kesehatan yang berstatus Dokter Umum berjumlah 110 orang, sedikit bertambah pada Pelita IV Tahun ke—III berjumlah 112 orang.

Dokter Gigi yang pada Pelita I berjumlah 4 orang, untuk Pelita IV tahun ke—III di Propinsi Maluku telah menjadi 17 orang.

Tenaga Kesehatan khususnya dokter yang bertugas di Rumah Sakit Pemerintah di Propinsi Maluku berjumlah 40 orang, untuk Dokter Umum 18 orang tersebar di berbagai daerah yaitu antara lain: 9 orang di RS Umum Kotamadya Ambon; 3 orang di RS Umum Ternate Kabupaten Maluku Utara; dan 1 orang masing-masing di daerah-daaerah RS Umum Tual Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tengah RS Umum Masohi, Namlea, Saparua, Tulehu, dan Halmahera Tengah RS Umum Soa Sio.

Tenaga perawat sebanyak 158 orang dan 37 orang bidan yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah tahun 1985, untuk RS Umum Ambon mempunyai perawat dan bidan yang paling besar jumlahnya yaitu 86 orang dan 18 orang. Lihat Tabel IV-17.

c. Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan arah pembangunan kesehatan yang juga ditujukan untuk pemberantasan penyakit menular dan penyakit rakyat, maka di Propinsi Maluku telah dilaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular dan pemberi perlindungan serta kekebalan masyarakat terhadap penyakit tersebut.

Doctors employed in state's hospitals in the Province of Molucca numbered 40 doctors, consisting of 18 common doctors serving at Ambon Municipality Public Hospital 9 doctors, Ternate North Molucca district Public Hospital (RSU) 3 doctors, and 1 each at Public Hospital of Tual (Southeast Molucca), RSU Masohi in Central Molucca district, RSU Namlea, RSU Saparua, RSU Tulehu, dan RSU Soasio Central Halmahera District.

Paramedics for the whole province totalled 158 nurses and 37 midwives employed in state hospitals, where 86 nurses and 18 midwives serve in Ambon Public Hospital. See Table IV - 17.

c. Health Service

In accordance with health development which is directed to abolishing contagious and people diseases, the Province of Molucca already realized programmes of eradication together with protection and immunization for the whole people.

The efforts for the abolishment of contagious diseases in Pelita III include immunization against diphtheria, tetanus, pertusis, poliomyelitis, measles and tuberclosis. Abolishment of malaria, haemorrhage fever, tuberculosis, framboesia, venereal disease, leprosy and filariasis had been taken.

In case of malaria, 136,447 blood samples had been ex amined in Pelita III and cure had been realized as much as 76% from the total target, i.e. 113,168 houses. At the end of Pelita II, the degree of prevalence was 22.65%, while in the period of Pelita III it became 31.41%. For Pelita IV there is a tendency of a decreasing prevalence degree.

In case of TBC, 5,000 bactery specimens had been examined and long-term cure for 931 patients, while short-term cure to 425 patients. In Repelita IV the figures tend to reduce.

Just like in Pelita II, during Pelita III the number of cases of framboesia had reduced to 0.06%. In case of diarrhoea/cholera, examination and healing reached 26% or 63,126 patients from the whole target, in cholera realization was 0.08% or 6,452 patients from the whole target of 80,000 bearers. At the end of Pelita II cases of cholera cited 3.2% while in Pelita III became 4.33% and possibly will tend to increase in Pelita IV.

Tabel / *Table IV — 17*

KEADAAN TENAGA MEDIS DAN PARA MEDIS PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH TAHUN 1985

NUMBER OF MEDICS AND PARAMEDICS IN STATE HOSPITALS, 1985

Kabupaten/Kotamadya *Municipality/District*	Rumah Sakit *Hospital*	Doktor / *Doctor*			Perawat *Nurse*	Bidan *Midwife*
		Umum *General Physician*	Gigi *Dentist*	Akhli *Specialist*		
Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	R S U Tual	1	1	—	15	3
Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	R S U Masohi	1	1	—	8	2
	R S U Namlea/	1	1	—	11	1
	R S U Saparua	1	1	—	9	2
	R S U Tulehu	1	1	—	3	2
Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	R S U Soa Sio	1	1	—	8	3
Maluku Utara/ *North Moluccas*	R S U Ternate	3	2	3	18	6
Kodya Ambon/ *Ambon Municipality*	R S U Ambon	9	3	8	86	18
Jumlah / *Total*		18	11	11	158	37

Sumber : *Biro Pusat Statistik*
Source : *BPS/Central Bureau of Statistic.*

Keadaan penyakit menular dalam PELITA III mencakup kegiatan-kegiatan Imunisasi terhadap difteri, tetanus, fertusis, poliomylitis, Campak dan tuberculosa. Pemberantasan penyakit malaria, diare, Demam Berdarah, Tuberculosa, Patek, Kelamin, Kusta dan Fileriasis.

Terhadap penyakit malaria dalam PELITA III telah dilakukan pemeriksaan sediaan darah sebanyak 136.447 specimen dan pengobatan dari target, dapat terealisir 113.168 buah rumah atau 76%. Pada akhir PELITA II tingkat penyebarannya (prevalence) 22,65%. Pada PELITA III prevelence 31,41% pada REPELITA IV kemungkinan kecenderungannya menurun.

Mengenai penyakit TBC paru-paru telah dilakukan pemeriksaan bakteria sebanyak 5.000 specimen, pengobatan berjangka panjang sebanyak 931 orang penderita dan pengobatan jangka pendek 425 orang penderita. Pada REPELITA IV nanti kemungkinan kecenderungan menurun.

Seperti halnya pada PELITA II dalam PELITA III penyakit patek di Maluku sudah menurun 0,06%. Mengenai penyakit diare/kholera telah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan sebesar 26% atau 63.126 orang dari target pengobatan, sedangkan realisasi dari pengobatan penyakit kholera sebesar 0,08% atau 6.452 orang dari target yang disediakan sebesar 80.400 orang penderita. Pada akhir PELITA II incidence penyakit kholera sebesar 3,2%, sedangkan pada PELITA III sebesar 4,33% dan kemungkinan kencenderungannya naik pada REPELITA IV.

Dalam PELITA III upaya pemberantasan Penyakit Arbovirosis/DHF banyak dilakukan dengan jalan penyemprotan pembersihan sarang nyamuk dan penanggulangan focus. Realisasi dari penyemprotan pada PELITA III melampaui target yakni sebesar 111% atau 8.892 dari target sebesar 8.000 buah rumah. Selain itu dilakukan tindakan abetesasi sebanyak 17.570 buah rumah atau 76% dari target sebesar 23.077 buah rumah, serta realisasi terhadap pembersihan serangga nyamuk 11.623 buah rumah atau 105% dari target sebesar 11.000, sedangkan sebagai usaha penanggulangan focus telah direalisir 63 focus atau 65% dari target sebesar 60 focus.

Pada PELITA III incidence rate sebesar 0,02% dan PELITA III 0,01% kemungkinan pada REPELITA IV tetap. Penyediaan obat-obatan dilaksanakan secara merata dan dapat menjangkau rakyat banyak. Kegiatan ini dapat dikatakan baru mulai pada Pelita II, sehingga setiap unit pelayanan kesehatan mulai dari Rumah Sakit, Puskesmas sampai Puskesmas Pembantu dapat menyediakan obat dalam melayani penderita.

Untuk memenuhi penyediaan obat, juga telah dibangun sarana penyimpanan dan pendistribusian di setiap Kabupaten/tingkat II berupa gudang sebanyak 5 buah dalam Pelita III. Disamping itu juga, telah dikembangkan sarana distribusi obat berupa apotik di Propinsi Maluku yang pada Pelita II, baru ada 12 buah. Kemudian Pelita III menjadi 18 buah, dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah baik di kota maupun desa terpencil sehingga berjumlah 20 buah Apotik.

Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, telah diberikan penyuluhan dan pengendalian sarana produksi dan distribusi oleh pemerintah. Selain itu juga penyuluhan terhadap

Cradication of Arbovirosis during Pelita III had been done through spraying and cleaning of mosquitos concentration. Spraying realization in Pelita III surpassed the target i.e. 111% or 8,892 houses from only 8,000 targeted houses. Besides, abatization also had been under taken, totalling 17,570 houses, or 76% from the target of 23,077 houses, together with realization of mosquitos focuses cleaning, reaching 11,623 houses or 105% from total target of 11,000 houses. Mean-while, in case of focuses overcoming, 63 focuses had been handled or 65% from target.

In Pelita II the incidence rate was 0.02% and in Pelita III the figure was 0,01% and possibly for Pelita IV is constant. Medicine supply was equally distributed, reaching the whole people. This condition happened just in Pelita II, where all units of medical service, such as hospitals, Puskesmas and auxiliary Puskesmas were able to provide medicine in their service.

For medicine stocking and distribution, storehouses and distribution facilities had been constructed in the whole districts in form of warehouses totally 5 buildings during Pelita III. In case of distribution there were just 12 dispensaries in the Molucca Province. It increased to 18 dispensaries in Pelita III, to be expanded again to step up services for the people with loser income, urban as well as rural people, to become 20 dispensaries.

In case of protecting people from imperfect drug and food, policies had been carried out in form of guidance and rearrangement of production and distribution facilities by the government. Besides, information was provided about abuse of drug and dangerous materials. For this reason, in Ambon Municipality facility for supervision, i.e. Hall of Drug and Food Supervision had been established.

Indicators to measure the degree of the people's health are infant mortality rate, nutrition condition, and illness figures. Infant mortality in the period of Pelita II is 140/1,000. Since Pelita III the figures decreased to 124/1,000.

Although in average for every year 2180 calories and 48,2 gram protein had been provided, Molucca consumption was already above average demand. Yet, there are still several communities suffering from lack of nutrition.

To increase nutrition condition among the people, efforts to improve family nutrition (UPGK) had been under taken. Prevention and overcoming of K.K.P. (Kasus Kekurangan Pangan/Cases of undernourishment) to the end of Pelita III reached 5 Municipalities/Districts, 34 Subdistricts and 224 villages.

Efforts to increase health service in case of deficiency of Vitamin A had been done in the area outside UPGK areas, by special distribution of Vitamin A. During Pelita III there were 15,471 children cases.

At the time of first distribution, in the mid period of Pelita III, several goiter surveys had been taken in 4 districts and 10 subdistricts with 250 villages. The surveys showed 96.5% of cases, i.e. 17,697 children taken from the examined 18,332 children, were found to suffer at the "O A" degree with prevalence of 3.4% from the whole children examined.

d. Family Planning

Since 1979 to the end of Pelita III there was a de lightful development in the progress of Family Planning improvement. During Pelita I and Pelita II, the progress was limited to the distribution of contraceptives for the acceptors provided at Family Planning Clinics, Hospitals, BKIA (Mother and Child Welfare Clinics) and Puskesmas (Public Health Centres).

penyalahgunaan obat dan bahan berbahaya. Oleh karena itu, di Kotamadya Ambon telah dibangun sarana untuk pengawasan berupa Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

Petunjuk-petunjuk untuk mengukur derajat kesehatan rakyat, antara lain adalah angka kematian bayi, status gizi dan angka kesakitan. Angka kematian bayi pada Periode Pelita II sebesar 140/1.000 kelahiran hidup. Sejak Pelita III, angka tersebut telah menurun hingga 124/1.000 kelahiran hidup. Dengan demikian berarti, bahwa tingginya angka kelahiran bayi sangat erat kaitannya dengan status gizi.

Meskipun rata-rata tiap tahun persediaan untuk konsumsi Maluku 2.180 dan 48,2 gram protein telah melampaui kebutuhan rata-rata namun masih terdapat berbagai kelompok masyarakat yang menderita kekurangan gizi walaupun kecil.

Dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat telah dilakukan Upaya-upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) pencegahan dan penanggulangan masalah KKP sampai akhir PELITA III (UPGK) telah mencakup 5 Kabupaten/Kotamadya, 34 Kecamatan dan 224 Desa.

Usaha Pencegahan defisilitas Vitamin A dilaksanakan pada Daerah yang tidak tercakup dalam UPGK telah diadakan distribusi khusus untuk menanggulangi masalah Vitamin A. Dalam PELITA III jumlah anak yang terdapat Vitamin A 15.471 anak Pada tahap distribusi pertama sejumlah survey gondok baru diadakan pada pertengahan PELITA III pada 4 Kabupaten, 10 Kecamatan dan 250 Desa.

Dari hasil survey penataan gondok tersebut ditemukan 96,5% atau sekitar 17.697 anak dari jumlah yang diperiksa (18.332 anak) dan ditemui menderita kurang yodium pada tingkat "O A" dengan prevalance 3,4% dari total anak yang diperiksa.

d. Keluarga Berencana

Program Nasional Keluarga Berencana di Propinsi Maluku sejak tahun 1979 sampai dengan akhir PELITA III, telah mengalami suatu kemajuan yang menggembirakan.

Usaha kegiatan Keluarga Berencana di Propinsi Maluku dalam PELITA I dan II, masih terbatas pada pelayanan alat-alat kontrasepsi kepada akseptor yang mengunjungi klinik-klinik KB, Rumah Sakit, dan BKIA atau Puskesmas.

Kemudian usaha tersebut telah ditingkatkan pada PELITA III dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha operasional, didahului dengan peranan atau motivasi kepada Masyarakat, peningkatan pelayanan kepada akseptor, mengadakan pendidikan dan latihan kepada petugas KB, serta mengadakan penelitian aspek-aspek yang berhubungan dengan program Kependudukan dan KB.

Dalam kaitan ini, pada akhir PELITA III pencapaian akseptor baru adalah 25.682 dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 24.600 akseptor atau sebesar 104%.

Selain itu berhasil pula membina akseptor lestari sebesar 29.038 peserta dari target direncanakan sebesar 34.000 peserta KB aktif atau 85,4% atau prevalence yaitu presentasi terhadap jumlah PUS 14,07%.

Selain itu diusahakan pula perluasan jangkauan, pembinaan terhadap kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi yang telah ada dan dapat menyempurnakan dengan baik kelembagaan sebagai wadah atau tempat berlangsungnya kegiatan.

Berdasarkan hasil sensus tahun 1980, maka jumlah penduduk Propinsi Maluku sebanyak 1.408.452 jiwa, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup cepat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebelum pada tahun-tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 1971 adalah 2,5% meningkat menjadi 2,89% pada tahun 1980. Peningkatan ini telah melebihi pertumbuhan secara Nasional yaiyu 2,34%. Hal ini akan menambahkan beban dalam melaksanakan Pembangunan pada umumnya.

Berdasarkan Perkiraan Penduduk Maluku dalam Repelita IV struktur umur penduduk menunjukkan adanya struktur umur muda lebih banyak sebagai akibat dari meningkatnya angka kelahiran disatu pihak dan di pihak lain adanya penurunan tingkat kematian karena adanya kemajuan di bidang kesehatan. Dengan adanya struktur yang demikian, perhatian pemerintah terkonsentrasi pada umur muda (0 - 19 tahun) ini akan menyebabkan kesulitan penyediaan kebutuhan dasar yang memadai terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dari hasil Sensus tahun 1980 jumlah penduduk di Propinsi Maluku adalah 1.490.215 jiwa, hasil registrasi penduduk tahun 1984 yang tersebar pada Dati II Kabupaten/Kotamadya sebagai berikut: Kotamadya Ambon (219.039); Maluku Utara (427.810); Maluku Tengah (484.483); Maluku Tenggara (247.796); dan Halmahera Tengah (111.087).

Bila dibandingkan jumlah penduduk dengan luas daratan di Propinsi Maluku, diperoleh kesimpulan bahwa kepadatan rata-rata 19 jiwa per—Km². Jumlah tersebut dinilai sangat sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan, karena penyebarannya tidak merata, baik antara pulau maupun antara desa dan kota

Then the efforts were improved in the period of Pelita III, firstly by increasing people's role and motivation, improvement of service to acceptors, training nd upgrading for Family Planning workers, and research about the whole aspects of population and family planning.

In this context, at the end of Pelita III realization recorded 25,682 participants or 104% from total target as much as 24,600.

Success was also reached in guidance to permanent acceptors, totalling 29,038 acceptors or 85.4% from target of 34,000 active members, with 14.07 prevalence, i.e. percentage taken from PUS (fertile-age couples).

Beside that, efforts had also been taken in service expansion, guidance to continuation of contraseptive usage, together with rehabilitation of buildings for central activity improvement.

According to Census 1980, the total population of Molucca Province numbered 1,408,452. This condition showed a rapid increase to compare with preceding years. The rate of increment in 1971 was 2.5%, became 2.89% in 1980. This increase surpassed the national percentage of population increment, at 2.34%. This condition was an additional burden in the realization of development as a whole.

Population estimate in Molucca in Repelita IV shows a greater number of younger people in the whole population on structure caused by increase of birth rate in one hand and decreasing of mortality rate due to health care improvement. With such structure, the government attention will be given to younger age (0-19), were those younger people will give problems in basic living dmands availability, especially in education and health care.

Registration 1984 revealed the total population of Molucca as much as 1,490,215, distributed as follows: Ambon Municipality 219,039; North Molucca 427,810; Central Molucca 484,483; Southeast Molucca 247,796 and Central Halmahera 111,087.

In comparison with the total population and the province total area, it can be counted that the occupational rate is 19 persons per KM². This figure is very low to compare with the need of work force for development because of its unequal distribution in interisland distribution or between villages and cities, where population just centered mostly in cities and small islands making it difficult to develop potential.

Although the rate of population increment and distribution in the Province of Molucca did not support the Family Planning programmmes, in 1984/1985 the programme itself had succeeded to guide 28,063 new acceptors and 45,805 active acceptors. There was also an increase in 1985/1986 to reach the number of 29,538 new acceptors and 65,878 active acceptors.

the rate of increment of new acceptors from 1984/1985 to 1985/1986 showed an addition of 1,475 new acceptors and 20,073 active acceptors. This means that degree of success in Family Planning development in the Province of Molucca is high enough, because of people's awareness to participate. See Tables IV - 18 and IV - 19.

Such achievement was gained by operational actions, in motivation and information given to the people, in increassing service to the acceptors, training and education for Family Planning field workers and research on the whole aspects in relation with population programme and family planning.

To the end of Pelita III, the total number of women involved in training to improve knowledge and skills administered through PKK (Family Welfare Promotion) were 6,510 from every subdistrict. So was also with P2WKSS (United Programme to Improve the Role of Woman towards Healthy Family), which succeeded to train 4,850 women.

The success of the national family planning programme cannot be measured only by total number of new acceptors and active acceptors, but also of no less importance by the degree of people's participation in handling and managing of programmes which is nowadays popular with the terms "alih peran" (transformation of role) and "alih kelola" (transformation of management).

One point showed up in family planning programme realization in this province was the high degree of people's participation, in the sense that people participate in management and responsibility of the whole programme. This can be seen in the growing and expanding of people's institution relating to the programme, such as Pos KB, Sub-Pos KB and Acceptors Group among the people.

Before 1982/1983, facilities such as Pos KB still did not exist yet, but in that period there were 171 Pos KB including Sub-Pos in the Province of Molucca. The number increased in 1986 to 949 Posts, while sub Posts totalled 458 units just in Ambon Municipality and North Molucca District, while other districts had not submitted any report.

Social Welfare

to overcome the problems of poverty, subsistence living standar, destitute children and other problems related to social suffering, a lot of social welfare

dimana penduduk terpusat pada daerah kota dan kepulauan yang kecil dengan potensi yang sukar untuk dikembangkan.

Walaupun laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk di Propinsi Maluku yang tidak mendukung, tapi program Keluarga Berencana pada tahun 1984/1985 telah berhasil membina 28.063 akseptor baru dan 45.805 akseptor aktif. Tahun 1985/1986, tetap ada peningkatan hingga mencapai jumlah 29.538 akseptor baru dan 65.878 akseptor aktif.

Akseptor baru dan aktif selama kurun waktu 1984/1985 - 1985/1986, menunjukkan kenaikan sebesar 1.475 akseptor baru dan 20.073 akseptor aktif. Ini berarti tingkat keberhasilan program Keluarga Berencana Propinsi Maluku tercapai berkat kesadaran masyarakat dengan partisipasinya mensukseskan Keluarga Berencana di Maluku cukup tinggi. Lihat Tabel IV-18. dan Tabel IV - 19

Pencapaian hasil tersebut, diperoleh dari kegiatan operasional melalui penerangan dan motivasi kepada masyarakat, peningkatan pelayanan akseptor dengan mengadakan pendidikan dan latihan bagi petugas Kb, serta penelitian terhadap aspek-aspek yang berhubungan pada program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Sampai akhir Pelita III, jumlah kaum wanita yang telah mengikuti latihan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam wadah PKK sebanyak 6.510 orang yang tersebar di setiap Kecamatan. Begitu pula dengan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W — KSS), berhasil menghimpun sebanyak 4.850 orang.

Keberhasilan program Keluarga Berencana Nasional tidak saja diukur dari semakin banyak peserta KB Baru maupun Aktif setiap tahun, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan program, seperti yang akhir-akhir ini populer dengan sebutan: "alih peran" dan "alih kelola".

Salah satu hal yang menonjol dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Maluku, adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dalam arti masyarakat turut serta sebagai pengelola dan bertanggungjawab penuh terhadap program. Dan ini dapat dilihat dengan semakin tumbuh dan berkembangnya institusi masyarakat seperti Pos KB, Sub Pos KB dan Kelompok Akseptor dalam masyarakat.

Dari segi kuantitatif tahun 1980/1981 dan 1981/1982, sarana seperti Pos KB belum ada. Tapi pada tahun 1982/1983, dibangun dan tersedia sebanyak 171 Pos KB termasuk Sub Posnya di Propinsi Maluku ini.

Tahun 1980/1981 dan 1981/1982, sarana seperti Pos KB belum ada di Propinsi Maluku tapi tahun selanjutnya yaitu tahun 1982/1983, sudah dibangun dan tersedia sebanyak 171 buah Pos KB termasuk Sub Posnya. Sedangkan di tahun 1986 di Propinsi Maluku, sudah ada Pos KB sebanyak 949 buah. Mengenai Sub Pos KB sebesar 458 buah di Kotamadya Ambon dan Kabupaten Maluku Utara, sedang daerah lainnya belum memberikan laporannya.

5. Kesejahteraan Sosial

Untuk mengatasi kecenderungan bertambahnya angka kemiskinan dibawah standar hidup, fakir miskin dan anak terlantar serta permasalahan lainnya, pelaksanaan kesejahteraan sosial selama ini sudah banyak pula dilaksanakan di Maluku. Kecenderungan tersebut umumnya terjadi di berbagai daerah yang padat penduduk dan juga di beberapa buah pulau yang besar seperti pulau Seram, Halmahera, Buru, Jamdena dan lain-lainnya, mempunyai masalah sendiri dengan kejarangan penduduk yang dapat menyebabkan keterbelakangan, kekurangan tenaga kerja, kurang pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Sehubungan dengan kondisi geografis Maluku yang turut mempengaruhi kehidupan bermasyarakat yang setiap saat terjadi, maka urutan prioritas masalah Kesejahteraan Sosial ada perbedaan dengan daerah lain di Indonesia. Misalnya dalam hal terhadap korban bencana alam, kemiskinan, keterlantaran, keterbelakangan, kependudukan, kenakalan remaja, kecacatan, ketunaan sosial, bekas hukuman yang memintakan penanganan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat.

Penanganan permasalahan sosial oleh satuan instansi secara sendiri-sendiri (single fighter), bagi Maluku adalah tidak mungkin. Di Maluku dibutuhkan kerjasama intra dan inter sektoral yang terbina selama ini. Terlibat didalamnya, aparat Pemerintah seperti instansi Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Agraria, Pekerjaan Umum, dan lain-lain dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.

Untuk menilai keberhasilan dari kerjasama ini, dapat diambil contoh dalam pelaksanaan pemukiman penduduk dari pulau Makian ke pulau Malifut. Penanganan secara terkoordinir antara instansi masing-masing yang menyediakan fasilitas seperti Pemerintah Daerah menentukan lokasi pemukiman, Kanwil Departemen Sosial mempersiapkan prasarana fisik dan sarana sosial serta pemindahan dan pembinaan manusianya. Ditunjang dengan sarana pendidikan oleh Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan, sarana jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Tabel / *Table IV — 18*

PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA KB BARU PER METODE KONTRASEPSI DI PROPINSI MALUKU 1979/1980 - 1985/1986
DEVELOPMENT OF FAMILY PLANNING NEW ACCEPTORS BY CONTRACEPTION METHOD IN THE PROVINCE OF MOLUCCA 1979/1980 - 1985/1986

Tahun *Year*	I U D *IUD*	P I L *Pill*	Kondom *Condom*	Operasi *Operation*	Suntik *Injection*	IMPL *IMPL*	Jumlah *Total*
1	2	3	4	5	6	7	8
1979/1980	707	2.152	133	226	524	—	3.742
1980/1981	1.923	4.791	386	226	683	—	8.009
1981/1982	3.716	4.413	551	379	1.936	—	10.995
1982/1983	4.449	4.236	450	209	2.164	—	11.508
1983/1984	7.639	10.100	737	305	6.894	—	25.675
1984/1985	6.616	9.820	1.378	310	9.939	—	28.063
1985/1986	6.725	11.491	435	244	10.632	11	29.538

Sumber : BKKBN Propinsi Maluku
Source : National Body of Family Planning, The Privinci of Molucca Regional Office.

Tabel / *Table IV — 19*

JUMLAH PESERTA KB AKTIF PER METODE KONTRASEPSI DI PROPINSI MALUKU 1979/1980 s/d 1985/1986
TOTAL NUMBER OF FAMILY PLANNING ACTIVE ACCEPTORS IN THE PROVINCE OF MOLUCCA BY METHOD OF CONTRACEPTION. 1979/1980 — 1985/1986

Tahun *Year*	IUD *IDU*	Pil *Pill*	Kondom *Condom*	Operasi *Operation*	Suntik *Injection*	IMPL *IMPL*	Jumlah *Total*
1	2	3	4	5	6	7	8
1979/1980	557	2.316	161	215	323	—	3.572
1980/1981	2.815	4.332	265	470	578	—	8.460
1981/1982	3.918	4.930	815	713	351	—	10.737
21982/1983	5.993	4.619	1.065	854	1.691	—	14.222
1983/1984	10.582	10.566	1.057	1.126	5.920	—	29.251
1984/1985	13.490	17.606	1.524	1.406	11.779	—	45.805
1985/1986	17.520	27.569	1.989	1.667	16.063	1.070	65.878

Sumber · BKKBN Propinsi Maluku
Source : National Coordinating Board for Family Planning, Regional Office of the Province of Molucca.

development programmes had been undertaken. The tendency of increasing poverty condition in general happens among densely-populated areas and also in several bigger islands such as Seram, Halmahera, Buru, Jamdena etc, which have special problems specified by its rare population causing backwardness, lack of work force, lack of health service and so on.

Because of Molucca geographical condition which influences the condition of people social life, priority policy in solution of social problems emerges, different with other part of the country. For example, in natural disaster victims rescues, poverty, juvenile delinguency, destitute, backwardness, population, retarded and neglected people, recidivist, which need government regional administration and the people's attention.

The handling of such social cases cannot be done by only individual instance or organization by herself, which is impossible especially for Molucca Province. The region needs cooperation and mutual asistance in transsectoral actions which run through this day. involved in this cooperation instances are Government offices such as : Social Department, Health Dept, Education Dept, Agriculture Dept, Public Work Dept, and so on under the coordination of the Regional Administration.

To evaluate such cooperation usefulness, example of programme realization can be taken in case of resettlement of the Makianisland inhabitants to move to Malifut island, where coordinating interinstance actions succeeded to realize the move; the Regional Administration of the Province decided the new location, the Regional Administration of the Province decided the new location, the Regional Office of Social Affairs Dept provided physical facilities, resettlement and occupation guidance, supported by education facilities by the Regional Office of Education and Cultural Affair Dept, oad facilities by Public Work Dept, health service by Health Affairs Dept and Agriculture Dept provided agricultural facilities.

Those various efforts at least had succeeded to prevent and to reduce the expanding of social welfare problems in the Province of Molucca.

The Basic Design of the Regional Development outlines that social welfare development is directed to improve social welfare for disabled people, the poor, destitute children, orphans, retarded persons, and social rehabilitation of natural disaster victims, improvement of number and utilizationof social welfare facilities, and social protection for the cripples.

During Pelita III, in solution for social welfare problems inthe Province of Molucca, realization had been taken in form of guidances such as : guidance

sarana Kesehatan dan Dinas Pertanian dengan Tanaman Pekarangan yang produktif.

Berbagai usaha tersebut, sekurang-kurangnya telah dapat menghambat kepesatan tumbuh dan berkembangnya masalah kesejahteraan sosial di Propinsi Maluku.

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku digariskan pembinaan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi jompo lanjut usia yang tidak mampu, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, penderita cacat dan rehabilitasi sosial bagi obyek tersebut, bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana alam, peningkatan jumlah dan pendayagunaan prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial, serta pembinaan kesejahteraan sosial bagi kelompok warga penyandang cacat.

Selama kurun waktu Pelita III untuk penanganan permasalahan sosial di Propinsi Maluku, dilaksanakan melalui kegiatan memberikan bimbingan seperti: Bimbingan/pengembangan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran yang berhasil digarap sebanyak 6.070 KK dan bimbingan swadaya masyarakat bidang perumusan dan lingkungan dengan sasaran garapan sebanyak 559 KK yang didahului dengan latihan USSM sebanyak 19 kali disusul dengan bantuan sarana non lokasi.

Sedangkan dalam pembinaan diberikan antara lain: Pembinaan pekerjaan sosial masyarakat, melalui proyek tersebut telah berhasil digarap dan dicetak sejumlah 1.530 pekerja sosial masyarakat Maluku; Pembinaan partisipasi sosial masyarakat, sasaran yang berhasil digarap melalui latihan-latihan dalam 1 (satu) kali praktek sebanyak 120 orang Tenaga Kerja Sosial Sukarela (TKSS) dan 80 orang yang telah berhasil mengikuti musyawarah keserasian sosial; Pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing, berhasil dibina sebanyak 920 KK (3.680 orang) dari jumlah keseluruhan ± 15.000 orang yang terdapat di Daerah Maluku yang mempunyai 13 suku terasing; dan pembinaan peranan dan fungsi wanita (PPFW), telah berhasil dibina 600 orang wanita binaan swadaya (WBS) dengan membekali mereka melalui latihan kepemimpinan wanita bagi 120 orang.

Bantuan dan penyantunan anak terlantar selama Pelita III berhasil dibantu/disantuni melalui sistem panti sebanyak 390 anak dan 5.100 orang memakai sistem non panti, sehingga keseluruhan berjumlah 5.490 orang anak.

Bantuan dan penyantunan bagi fakir miskin, sasaran yang digarap adalah para keluarga yang kondisi kehidupannya terdapat dibawah "proverty Line" dengan jumlah yang digarap melalui sistem swadaya sebanyak 270 KK, dan melalui sistem pemukiman lokal sebanyak 69 KK, keseluruhannya berjumlah 319 KK yang berhasil digarap dalam Pelita III.

Sedangkan bantuan dan penyantunan bagi lanjut usia selama Pelita III, kegiatan dilaksanakan melalui sistem panti sebanyak 150 orang dan non panti sebanyak 5.900 orang pada Kabupaten/Kotamadya di daerah Maluku. Sedangkan bantuan dan penyantunan bagi lanjut usia selama Pelita III, kegiatannya dilaksanakan melalui sistem Panti sebanyak 150 orang dan non panti sebanyak 5.900 di Kabupaten/Kotamadya di daerah Maluku.

Menghadapi masalah generasi muda, diarahkan pada pembinaan melalui Karang Taruna yang berhasil digarap pada Pelita III sebanyak 174 buah Karang Taruna yang terdiri dari 84 Karang Taruna Tumbuh, 60 buah Karang Taruna Berkembang, dan 30 buah Karang Taruna Maju. Pada tahun 1985/1986 ada peningkatan jumlah Karang Taruna, hingga menjadi 1.564 buah Karang Taruna. Sedangkan untuk klasifikasinya, Karang Taruna Tumbuh bertambah lebih besar mencapai 1.496 buah. Lihat Tabel IV-20.

Bantuan dan penyantunan korban bencana alam pada Pelita III di Propinsi Maluku, melalui kegiatan pemukiman lokal telah berhasil dibantu dan disantuni sebanyak 1.700 KK dan **Home Base** sebanyak 1.960 KK yaitu di Malifut, Kabupaten Maluku Utara dan Ulahahan di Kecamatan Werinama Kabupaten Maluku Tengah.

Di Propinsi Maluku masalah Kesejahteraan Sosial untuk bencana alam, terdiri dari beberapa jenis yaitu angin, topan, banjir, kekurangan pangan, kebakaran, kecelakaan perahu, dan lain-lainnya. Tahun 1985/1986 peristiwa bencana alam ada 77 kali dan jumlah korbannya 18.192 orang dengan jumlah rumah 1.574 buah.

Masyarakat terasing di Propinsi Maluku adalah penduduk asli yang hidupnya tersebar di Pulau Halmahera, kepulauan Sula, Pulau Buru, dan Pulau Seram secara terpencil dan terpencar dengan mata pencaharian tergantung pada alam sekitarnya. Untuk menciptakan suatu kondisi masyarakat yang bersifat dinamis, agar tidak ada sekelompok masyarakat yang tidak terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, Pemerintah terus mengadakan pendekatan, pembinaan, dan pengembangan. Kegiatan tersebut dengan cara antara lain, pemukiman lokal, jaminan hidup dalam jangka waktu tertentu, bimbingan motivasi dan

and expansion of peoples's self efforts in formulating of social problems and environmental cases reached 559 families preceeded by USSM training 19 times followed by non-institution facility aid.

As regard promotion, realization included : welfare promotion of social workers, enrolled by 1,530 trainess as Molucca social workers; guidance for people's social participation, with 120 trainees nominated as TKSS or Voluntary Social Workers and 80 persons followed social adaptation training; guidance for primordial tribe welfare to reach 920 families (3,680 souls) from total tribe members of about 15,000 throughout Molucca divided in 13 sub-tribes; and in case of increasing functional role of woman by PPFW or promotion of woman role and function, 600 women had been trained to be promoted as WBS or self-motivated woman and also to train some other 120 women in women leadership training.

Aid and support for destitute children during Pelita III reached 350 children under orphanage system and 5,100 children under non-orphanage system. Total protection became 5,490.

Aid and support for poor people was directed to families living under the "poverty line" in self-support system 69 families, making a grand total of 339 families during Pelita III.

Meanwhile aid and support given to invalids during Pelita III include activities by reformatory system reaching 150 persons and non-reformatory system as much as 5,900 persons in all districts and municipality in the Province.

In facing the younger generation, during Pelita III the province created 174 youth centres including 84 novel youth centres, 60 developing youth centres and 30 advanced centres. In 1985/1986 youth centres creation increased to the number 1,564 centres with novel youth centres numbered 1,496. See Table IV - 20.

Aid and support provided for victims of natural disasters during Pelita III in the Province of Molucca channeled through local resettlement reached 1,7000 families and home base totalled 1,960 in Malifat district of North Molucca and Ulahahan in Sub-district of Werinama, District of Central Molucca.

Cases of natural disasters in the Province of Molucca consist of hurricane, flood, food shortage, fire, perahu wreckage and so on. In 1985/1986 natural disaster casses were 77 accidents with total victims of 18,192 persons while houses fallen were 1,574.

Primordial tribes in the Province of Molucca spread in the island of Halmahera, Sulu island, Buru and Seram as original inhabitants, remoted and scattered with the living only depending on its surrounding environment. To reach a dynamic society where there will be nor part of the people which do not gain any effect of development, the government continually creates approach, guidance and expansion, among others with local settlement, life supporting for a certain period, motivation and stimulation in form of production means, in farming, seed supply and domestic equipments. See Tables IV - 21 and IV - 22.

6. Housing

Housing and dwelling condition in the Province of Molucca at the end of Pelita III showed improvement. Yet, here and there appear deficiencies to be solved. For example, in Ambon Municipality, Ternate and other cities in Molucca, a serious problem of housing and dwelling can be felt. Irregular inhabitation and lack of space to provide those coming in urbanization streams which are continually in creasing, cause environmental disorder, together with lack of occupation facilities such as drinking water, drainage system facility for polluted water waste, scum wasts facility and so on.

Development of housing and dwelling environment showed an improved condition in 1985/1986 in the Province of Molucca. In the realization, this sector applied two policies, i.e. : public housing and drinking water (clean water) supply programmes.

Public housing programme had done renovation and environmental rehabilitation in 30 villages, among others in North Molucca district 15 villages, Central Molucca 9 villages, and Southeast Molucca 6 villages.

Pioneering activities in dwelling environment rehabilitation programme in 1985/1986 had been realized in Ambon Municipality covering an area of 20 Ha, Ternate 15 Ha, Tual 10 Ha, Saparua 10 Ha and Soasiu 10 Ha. In these 5 cities drinking water supply facilities has been rehabilitated as much as 17, 20 MCK or MANDI-CUCI-KAKUS (Bath-Wash-Lavatory), rubbish facility 17 and rehabilitation of neighborhood roadways as long as 6,700.9 M long.

Urban housing improvement was created in pioneering os slum area improvement, where during Pelita III it reached 165 Ha area in 3 cities, for the advantage of 46,00 inhabitants in the lower income community.

Tabel / *Table IV — 20*

JUMLAH KARANG TARUNA DAN KLASIFIKASINYA MENURUT KABUPATEN/KOTAMADYA TAHUN 1985/1986
TOTAL NUMBER OF YOUTH CENTRE AND ITS CLASSIFICATION BY DISTRICT AND MUNICIPALITY, 1985/1986

Kabupaten/Kodya *District/Municipality*	Kecamatan *Sub-district*	Desa *Village*	Jml Karang Taruna *Total number of Youth Centre*	Klasifikasi Karang Taruna *Youth Centre Classification*			
				Tumbuh *Novel*	Berkembang *Developing*	Maju *Advanced*	Percontohan *Model*
Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	8	179	432	393	19	—	—
Maluku Tengah/ *Central Moluccas*	18	171	378	329	7	—	—
Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	6	52	107	145	6	—	1
Maluku Utara/ *North Moluccas*	21	295	587	425	35	—	—
Kotamadya Ambon/ *Ambon Municipality*	3	39	60	204	—	—	—
Jumlah / *Total*	56	736	1.564	1.496	67	—	1

simulasi berupa peralatan produksi terutama pertanian, pembibitan dan peralatan rumah tangga. Lihat Tabel III-21 dan III-23.

6. Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Keadaan perumahan rakyat dan pemukiman di Maluku pada akhir Pelita III menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Namun demikian di sana-sini masih terdapat pula keadaan yang perlu segera ditangani. Sebagai contoh di Ambon, Ternate dan kota-kota lainnya di Maluku sudah sangat dirasakan adanya permasalahan perumahan dan pemukiman. Perumahan yang tidak teratur, disamping kekurangan perumahan untuk menampung arus urbanisasi yang semakin meningkat menyebabkan lingkungan yang tidak sehat, selain itu sarananya juga terasa kurang sekali memadai seperti penyediaan air bersih, sarana untuk pembuangan air limbah, pembuangan sampah dan sebagainya.

Pembangunan Perumahan Rakyat dan Pemukiman di Propinsi Maluku pada tahun 1985/1986 telah menunjukkan hasil-hasil yang baik bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam penanganannya sektor ini mempergunakan dua program yaitu program perumahan rakyat dan program penyediaan air bersih.

Melalui program perumahan rakyat telah dilaksanakan kegiatan perintisan pemugaran rumah dan perbaikan lingkungan di 30 desa. Adapun desa-desa yang dijangkau oleh program ini antara lain: Kabupaten Maluku Utara (15 desa), Maluku Tengah (9 desa), dan Maluku Tenggara (6 desa).

Sedangkan kegiatan perintisan perbaikan lingkungan perumahan pada tahun 1985/1986 telah dilaksanakan masing-masing di Kotamadya Ambon seluas 20 Ha, Ternate 15 Ha, Tual 10 Ha, Saparua 10 Ha, dan Soa Sio 10 Ha. Di kelima kota ini juga dilaksanakan pembuatan sarana air bersih sebanyak 17 buah. MCK 10 buah, persampahan 17 buah dan perbaikan jalan lingkungan 6.700,9 m.

Usaha perbaikan lingkungan perumahan kota, dilakukan dengan kegiatan perintisan perbaikan kampung yang selama Pelita III dapat diselesaikan pada 3 (tiga) kota dengan luasnya 165 Ha dan memberi manfaat bagi 46.000 penduduk yang pada umumnya berpenghasilan rendah.

Dalam Pelita III Perum Perumnas mulai membangun 500 buah rumah di Kodya Ambon, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam pembangunan Perumnas ini ditemui masalah dalam hal pengadaan tanah, dimana harga tanah yang cukup tinggi sehingga sangat mempengaruhi pembangunan rumah itu sendiri.

Penyediaan air bersih untuk daerah perkotaan selama Pelita III telah pula dibangun 135 buah hydran umum, dan telah diselesaikan sambungan rumah sebanyak 10.522 sambungan. Dengan dibangunnya hydran-hydran umum tersebut serta dipasangnya sambungan-sambungan rumah di atas, maka tercatat barulah 34% penduduk perkotaan yang mencapai pelayanan air bersih.

Untuk daerah pedesaan, selama Pelita III telah dibangun sejumlah sarana air bersih sederhana berupa: Penampungan Air Hujan (PAH) sebanyak 298 buah, Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 16 buah, sumur pompa tangan 4.024 buah, Sumur Galian (SGL) 415 buah dan

Tabel / *Table IV — 21*

JUMLAH MASYARAKAT TERASING MENURUT JENIS KELAMIN DAN JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA MENURUT DAERAH TINGKAT II/ KODYA 1985/1986
TOTAL NUMBER OF PRIMODIAL TRIBE PEOPLE BY SEX AND NUMBER OF SOULS IN FAMILY AND BY DISTRICT AND MUNICIPALITY, 1985/1986

Kabupaten/Kotamadya *District/Municipality*	Jumlah masyarakat terasing (KK) *Number of primordial tribe*	Jenis Kelamin/*Sex*		Jumlah jiwa dalam keluarga *Total souls in family*
		Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	
1	2	3	4	5
Maluku Tenggara/ *Southeast Moluccas*	—	—	—	—
Maluku Tengah/ *Central Maluku*	1.378	1.219	159	5.967
Halmahera Tengah/ *Central Halmahera*	278	264	14	11.291
Maluku Utara/ *North Moluccas*	313	160	153	1.573
Kodya Ambon/ *Ambon Municipality*	—	—	—	—
Maluku / *Moluccas*	1.969	1.643	326	18.831

Tabel / *Table IV — 22*

HASIL PEMBINAAN MASYARAKAT TERASING TAHUN 1985/86 DI DATI I MALUKU
RESULT OF PRIMODIAL TRIBE PROMOTION IN THE PROVINCE OF MOLUCCAS, 1985/1986

Pendekatan *Approach*		Pembinaan *Guidance*		Pengembangan *Improvement*	
KK *Family*	Jiwa *Soul*	KK *Family*	Jiwa *Soul*	KK *Family*	Jiwa *Soul*
1	2	3	4	5	6
—	—		—	—	—
350	1.500	350	1.500	875	3.370
—	—	—	—	—	—
200	750	100	400	300	1.200
—	—	—	—	—	—
550	2.250	450	1.900	1 175	4.570

In Pelita III, Perum Perumnas, the National Housing Public Company started to construct 500 houses in Ambon, provided for lower income people. In this Perumnas construction plan.

Water supply for urban areas during Pelita III had been developed through the construction of 135 public hydrants and household supply as much as 10,522 customers.
With such hydrant construction and pipelines to household customers, 34% of the total urban inhabitants have already been served by water supply deve-

Penampungan Mata Air dengan Perpipaan sebanyak 9 (sembilan) buah.

Pengadaan sarana air bersih pada tahun 1985/1986 Propinsi Maluku, telah dilaksanakan pembuatan bangunan produksi pelengkap 650/2 unit yaitu di Soa Sio, dengan membebaskan tanah seluas 600 m², dan 1 unit sumur. Selain itu di Ambon telah direhabilitasi bronkaptering 1 unit pembuatan gudang 50 m² di Masohi.

Sebagai penunjang pengadaan air bersih pada tahun yang sama, dilakukan pemasangan pipa berukuran 15.444 m, untuk kota Ambon, Tual dan Masohi. Dan untuk kepentingan masyarakat telah tersambung kapasitas sambungan rumah 165 unit masing-masing di Tual (108 unit) dan Masohi (57 unit).

Dengan pemenuhan keperluan dasar (basic need) 60 liter/orang perhari, maka sampai akhir tahun 1985/1986 dinilai cukup memadai untuk mencapai sasaran sebesar 75% jumlah penduduk yang dilayani sampai akhir Pelita IV (1988/1989). Lihat Tabel IV-23.

Masalah sampah khususnya di kota Ambon dan Ternate, merupakan masalah yang mendesak untuk segera ditangani, mengingat bahwa Ambon sesuai Keppres Nomor 15 Tahun 1983 merupakan pintu gerbang pariwisata untuk Indonesia bagian Timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 150.000 jiwa, maka untuk kedua kota tersebut tiap harinya menghasilkan 300 M³ sampah (2 lt/orang/hari). Dengan keterbatasan sarana 3 buah truk sampah untuk Ternate, 10 gerobak sampah ditambah 4 buah truk sampah untuk Ambon kedua kota tersebut mengadakan kegiatan penanganan sampah yang ada. Pada kondisi yang demikian ini baru 15—20% sampah yang dapat ditangani. Selain fasilitas pengumpulan terbatas, juga belum ada fasilitas pembuangan akhir. Oleh karena itu terjadinya pemindahan sampah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Saluran air hujan di daerah perkotaan, sebagian besar adalah peninggalan Belanda. Dengan perkembangan kota yang sangat pesat akhir-akhir ini, maka fungsi saluran air hujan tersebut sudah sangat berkurang. Akibatnya timbul genangan-genangan air yang sangat mengganggu keseimbangan lingkungan.

Pembuangan kotoran manusia di daerah pedesaan masih sangat memprihatinkan, 90% lebih penduduk pedesaan membuang kotorannya di tepi-tepi pantai dan sungai-sungai. Tentunya hal tersebut merugikan karena dapat mencemari badan-badan air yang ada.

7. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian

Selama kurun waktu 1979 - 1984 pembangunan Iptek di Daerah Maluku baru sampai pada pengadaan sarana dan prasarana dan program-program penelitiannya baru merupakan penelitian-penelitian dasar yang berkesinambungan serta beberapa penelitian terapan yang sifatnya sporadis. Bagian paling besar dalam sektor ini selama Pelita III terletak pada sarana dan prasarana Iptek pada matra laut yang terjelma dalam beberapa kegiatan: Pembangunan ruang kerja dan laboratorium serta peralatan ilmiah pada Stasiun Penelitian Ambon, LON—LIPI di kompleks Guru-guru Kotamadya Ambon; Pengembangan laboratorium basah, peralatan ilmiah dan perpustakaan kelautan pada Fakultas Peternakan/Perikanan UNPATTI di Kampus UNPATTI, Poka, Kotamadya Ambon; Pengembangan peralatan penelitian dan pembangunan gedung Balai Penelitian Teknologi Perikanan di Rumahtiga, Kotamadya Ambon; Pengembangan sarana pendidikan ketrampilan penangkapan ikan pada BKPI di Poka, Kotamadya Ambon; Pengembangan tenaga peneliti pada SPALON—LIPI yang pada awal Pelita III baru sebanyak 4 (empat) orang menjadi 26 orang pada akhir Pelita III, serta penambahan tenaga peneliti pada Fakultas Peternakan/Perikanan UNPATTI dan BPTP.

Kondisi peralatan ilmiah sampai dengan akhir Pelita III matra laut baru sampai pada taraf minimal yang dibutuhkan, termasuk pembangunan kapal penelitian LON—LIPI yang masih dalam tahap penyelesaian. Sedangkan pada sektor-sektor lain pengembangan sarana Iptek juga baru mencapai kebutuhan minimal, antara lain di sektor Industri dengan pengembangan Balai Kimia Ambon di sektor pertanian dengan pengembangan sarana pengolahan data dengan mempergunakan mini-computer.

Penelitian secara umum bidang Iptek dikhususkan untuk menggali dan mempelajari sumber daya hayati dan non hayati di perairan Maluku serta di kepulauan yang menaburi laut-laut itu. Penelitian di bidang kelautan meliputi inventarisasi sumber daya hayati khususnya yang bernilai ekonomi, menentukan pola sebaran geografi, meneliti sifat-sifat biologi dari sumber daya tersebut untuk kemudian dibudidayakan bagi kepentingan masyarakat banyak. Penerapan teknologi pembudidayaan harus juga memperhitungkan padat karya dan kelestarian lingkungan.

Selain dari itu untuk menunjang peningkatan produksi di sektor produksi hasil-hasil laut, penelitian tentang sebaran musiman tingkat kesuburan dan kondisi lingkungan fisik serta kimia dikerjakan secara

lopment.

Water supply for villagers during Pelita III consisted of construction of clean water facilities in form of : PAH (Rain Water storage) 298 units; PMA (Water source protection) 16 units; Handpump well 4,024 units; SGL (Dug Wells) 415, Water source container with pipelines 9.

Clean water supply facilities in 1985/1986 in the Province of Molucca had been realized with the construction of supplementary production building 650/2 units in Soasio, with land prepared 600 M² and 1 well unit. In Ambon had been rehabilitated 1 unit or bronkaptering and in Masohi 50 M² construction of a warehouse.

As a supplement in water supply availability in the same year, pipeline system had been constructed as long as 15,444 M long for Ambon Municipality, Tual and Masohi. And in public service, pipeline construction had been realized to connect people's houses, i.e. in Tual 108 units and in Masohi 57 units, making a total of 165 units.

With the basic need of 60 litre/person/day, until the end of 1985/1986, the realization can be counted enough to supply 75% of the total population in the whole province as targeted until the end of Pelita IV (1988/1989). See Table IV - 23.

Tabel / *Table IV — 23*

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 1985/1986
SUPPLY OF CLEAN WATER UNTIL END OF 1985/1986

No	Kota *City*	Penyediaan Air 75% dari Jumlah Penduduk ***Water supply for 75% from total population***
1.	Ambon	60 liter/orang per hari/60 *litre/person/day*
2.	Tual	56 liter/orang per hari/56 *litre/person/day*
3.	Ternate	106 liter/orang per hari/106 *litre/person/day*
4.	Masohi	156 liter/orang per hari/156 *litre/person/day*

The problem of rubbish, especially in Ambon an Ternate, is an enforced problem which ought to be solved soon, remembering that the Keppres (Presidential Decision) No 15 or 1983 decides. Ambon as an Eastern Tourism gate for Indonesia.

For the two cities with total population of 150,000 souls, daily production of rubbish is 300 M³, i.e. 2 litre/person/day. With limited facility, i.e. 3 rubbish trucks for Ternate, 10 vans and 4 trucks for Ambon, the two cities tried to overcome their rubbish problems. At this condition, only 15% – 20% of the whole gathered rubbish can be cleaned up. Beside such collecting facility, the two cities also have not yet dumping locations, resulting changes of dumping from one place to other location.

Rain drainage system in urban areas is still in greater part as the same with that left by the Dutch government. With development of urban areas after independence until nowadays, drainage condition cannot be function perfectly. This condition causes stagnation, destroying environmental stability.

Toiletary system among villagers is still in a depressed condition, where 90% of villagers are still in the habit of putting out excrements on the beach or river banks, resulting pollution to the water circulation system.

7. Science, Technology and Research

During the period or 1979-1984 development in Science and Technology in the Province of Molucca just reached only to the development of facility and infrastructure, while in research was just realized in basic researches and several sporadic applied researches. Greatest part of this realization was laid on marine sector in form of several activities such as : construction of work spaced and laboratory with equipments for Ambon Research Station, LON-LIPI; Oceanography National Institute/Indonesian Council of Sciences in Teachers Training Complex Ambon Municipality, Wety Laboratory Institute, Oceanography Library and Scientific equipments improvement at Rumahtiga, Ambon Municipality, improvement of equipments and tools for training in fish catching at BKPI Poka, Ambon, upgrading of research workers at SPA-LON/LIPI; Higher Fishery School-National Oceanography Institute/Indonesian Council of Sciences, where in the beginning of Pelita III, 4 workers were graduated, increasing to 26 at the end of Pelita III, additional number of research workers at Faculty of Fishery University of Pattimura and BPTP (Research Hall for Fishery Technology).

Equipment condition for scientific purpose in marine sector to the end of Pelita III was just in the minimal requirement, including of a ship for research activity or LON/LIPI under construction. In other sectors, such minimum requirement condition also existed, for instance in the industrial sector with improvement of Chemical Hall Ambon, in agricultural sector with facility of data processing with mini computer.

berkala pada daerah-daerah yang benar-benar merupakan daerah laut yang potensial. Penelitian hutan bakau dikerjakan untuk menginventarisasi jenis serta kepadatan untuk dimanfaatkan sebagai daerah ladang ikan, maupun sebagai hutan produksi. Lokasi penentuan potensi hutan bakau dan memanfaatkannya dikhususkan di Kepulauan Aru dan Teluk Kao serta daerah lain yang mempunyai perspektif peningkatan sumber daya laut yang meyakinkan bagi suatu peningkatan taraf hidup masyarakat. Penelitian sifat-sifat oseanografi perairan serta pola perubahannya dari waktu ke waktu pada laut-laut yang dalam seperti Laut Banda, Laut Halmahera, dan Laut Maluku perlu dikerjakan secara berkala.

Penelitian pertanian mencakupi beberapa aspek antara lain: Menginventarisasi dan kemungkinan pengembangan dari komoditi pangan terutama yang non beras.

Inventarisasi hutan dan tanaman serta sarana pemanfaatannya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, dengan kemungkinan akibat-akibat yang akan timbul baik secara biologis. Inventarisasi hasil-hasil perairan laut dan perairan umum untuk dikembangkan sebagai sumber pangan dan ekspor seperti sumber daya hayati laut (penelitian kemungkinan-kemungkinan pembangunan tambak-tambak udang di Teluk Kao, Kepulauan Aru dan Perairan Bakau lainnya, kemungkinan peternakan kerang dan siput serta kemungkinan perkebunan rumput laut, inventarisasi dan peningkatan cara-cara pengolahan tradisional) dan sumber daya perairan umum (penelitian perikanan air tawar dan payau seperti potensi udang gala di Buru dan sungai-sungai lainnya, potensi ikan air tawar di danau Duma dan danau-danau sekitarnya di Kecamatan Galela). Penelitian pengembangan peternakan yang meliputi inventarisasi lokasi-lokasi peternakan rakyat, pengadaan bibit-bibit ternak, penelitian makanan ternak serta penelitian penggunaan limbah darat sebagai sumber energi non minyak.

Penelitian di bidang pertanian juga meliputi penelitian kemampuan produksi tanah dan hutan, penelitian hama penyakit serta pengaruh musim terhadap komoditi-komoditi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan mulai dari tingkat penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Penelitian pengembangan perkebunan meliputi daerah perkebunan, komoditi-komoditi perkebunan baru serta teknologi pasca panen. Penelitian di bidang pengairan meliputi penelitian fasilitas air serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sistem aliran dan sifat-sifat hidrolis dan sumber-sumber air yang dapat dikembangkan bagi pertanian. Perlu dijalin kerjasama penelitian dengan Universitas Pattimura, khusus dalam mendidik kader-kader peneliti.

Untuk penelitian sektor industri meliputi peningkatan mutu industri perabot rumah tangga untuk ekspor, kemungkinan penggunaan teknologi baru yang padat karya dalam pengembangan industri rakyat yang telah ada. Penelitian tentang kemungkinan pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi bahan jadi serta cara-cara pengembangan industri hasil-hasil pertanian yang telah ada. Penelitian dan analisa mutu hasil-hasil industri yang telah ada untuk dikembangkan. Penelitian bahan-bahan industri yang baru. Untuk sektor industri ini masih dibutuhkan para peneliti serta peningkatan peralatan ilmiah untuk laboratorium industri perlu dilaksanakan melalui pengembangan Balai Kimia Ambon. Kemampuan kerja balai kimia ini perlu dikembangkan sampai ke Daerah Tingkat II khususnya pada Daerah Tingkat II yang berpotensi bahan-bahan baku industri cukup besar. Dalam penelitian ini perlu dijalani koordinasi mengenai program maupun pelaksanaan program dengan sektor pertanian, Universitas Pattimura (terutama partisipasi mahasiswa tingkat terakhir), serta lembaga-lembaga lain yang ada di daerah.

Di sektor pertambangan dan energi diarahkan meliputi penelitian potensi hasil-hasil tambang dan mineral yang ada di Kepulauan Maluku serta peranannya dan sarana pemanfaatannya.

Pada sub sektor energi diadakan penelitian tentang kemungkinan penggunaan gejala-gejala alam sebagai sumber energi non migas seperti tenaga angin, tenaga surya, biogas, Ocean Thermal Energy Convertion (OTEC) dan proses-proses alam lainnya. Keikutsertaan Universitas Pattimura dalam program penelitian ini sangat diharapkan.

Sektor perhubungan dan pariwisata diadakan penelitian pengembangan perhubungan darat dengan perluasan jalan dan mutu jalan, penelitian alur lalu lintas Ferry yang baru, penelitian pengembangan perhubungan laut dengan kemungkinan pembangunan dermaga yang baru atau pemindahan dermaga yang telah ada sesuai dengan keadaan musim.

Pendirian stasiun cuaca untuk pelayaran, telah ditingkatkan keamanan pelayaran rakyat maupun pelayaran, khususnya pada alur pelayaran perintis maupun pelayaran lainnya dalam rangka pengolahan sumber daya alam yang telah dan yang akan dikembangkan. Di sub sektor perhubungan udara penelitian pengembangan lapangan terbang melihat kemungkinan pengembangan sarana dan prasarana meteorologi dan geofisika pada jaringan penerbangan yang telah ada.

Research in science and technology sector was especially directed to the exploration and study of physical and non-physical property sources in the provincial waters and on the islands spreading on it. Oceanographic research es undertaken include inventory-taking of physical property viewed from economical value, deciding prevalence geographic design, investigating biological condition of sources to be expanded in breeding for the benefit of the whole people. Application of breeding system ought to be considered with the importance of work safety and environmental security.

Besides, in relation to supporting improvement of production in marine sector, research has also been taken in season prevalence of fertility rate and chemical and physical environmental condition, constanly taken in continuous wai in the areas considered as truely high marine potential.

Mangrove forest research was taken to inventorize kinds and solidity for the purpose of utilization for fish breeding, and also for production forest. Location of forest potential especially taken in Aru islands, Kao bay and other sites having a perspective improvement of marine physical convicting property, for the sake of people's increasing prosperity.

Research on oceanographic characters and its alternations from time-to-time on the seas such as Banda Sea, Halmahera Sea, and Molucca Sea ought to be taken constantly.

Researches on agriculture cover the aspects such as : inventorization and possible development of non-rice food stuff commodities.

Research and inventorization of forestry potential and its plants with recommendation on utilization for people's prosperity improvement, with possible emergence of favouable biological effects.

Inventorization of marine and public waters products to be developed to become sources of foodstuff and export such as marine meat products (research on possibility of development of shrimp ponds in Kao bay, Aru islands and other mangrove sites, possibility of oyster and snail breeding, also of seaweed planting, inventorization and improvement of traditional works), and public water resources (research on public water and brackish water fishery such as shrimp in Buru island and other rivers, lake fishery potential in Duma Lake and the surrounding lakes in the subdistrict of Galela).

Research on cattle breeding for the improvement of smallholders' cattle breeding development, such as inventorization of smallholders' cattle breeding, supply cattle breeds, research on cattle fodder and research on cattle's waste as an energy source in non-oil category.

Agricultural research also took on the subjects of soil and forest production capacity, research on pests, season influence towards agricultural commodities, farming and forestry from the stage of planting, growing, harvesting and post-harvesting.

Researches on farming consist of farming locations, new farming commodities, and post-harvest technology.

Researches on irrigation cover water facility with its influencing factors, irrigation system and hydraulic characters of it, water sources which can be exploited for agricultural purposes. Research cooperation is urgently needed with University of Pattimura, especially to train research cadres.

In industrial sector, research activities include research on improvement of furniture production quality for export purpose, possibility to apply new labour-intensive technology in people's industry. Research on agricultural products manufacturing, and improvement of age existing agricultural products industry. Research on new industrial materials. In this industrial sector, more researchers and improvement of scientific equipments are still needed for industrial laboratory through the development of Ambon Chemistry Hall.

The capacity of this Chemistry Hall ought to be expanded to reach district regions, especially those with great potential of industrial material. In this with great potential of industrial material. In this research programme, realization ought to be in cooperation with the agricultural sector, University of Pattimura (especially with participation of the highest level students and with other institutions in this region.

In the sector of mining and energy, research was conducted on mining products potential and mineral deposits on the archipelago, its role and utilization.

In the subsector of energy, research was conducted on natural phenomena as non-oil sources of energy, such as wind energy, solar energy, biogas, ocean thermal energy conversion (OTEC) and other natural processes. Participati on of the University of Pattimura in this activity is highly expected.

In the sector of transportation and tourism, research was taken on road construction and quality improvement, on new ferry traffic, possible improvement of sea communication with possibility of new harbour construction or removal of the present harbour to another place due to season circumstances.

Construction of weather station for shipping, improvement of people's shipping security, pioneering interisland communication, and other sea communication within the framework of exploiting the natural resources potential.

Sektor pariwisata yang perlu diteliti di daerah lautan dan di kepulauan ini adalah pengembangan potensi wisata bahari khususnya wisata bawah air.

Sektor perdagangan dan koperasi yang mendapat perhatian dalam penelitiannya adalah penelitian pengembangan pemasaran bagi semua sektor produksi di Daerah Maluku. Dalam kaitan dengan perdagangan, penelitian tentang selera konsumen, sistem pengepakan, standar mutu komoditi perdagangan dan parameter-parameter lain yang berhubungan erat dengan perluasan jaringan pemasaran. Untuk bidang koperasi, penelitian tentang sikap masyarakat dalam menerima KUD ditinjau dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tradisional serta perubahan struktur sosial. Penelitian ini bertujuan untuk pemantapan koperasi sebagai lembaga yang berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam penelitian ini partisipasi Universitas Pattimura sangat diharapkan.

Kegiatan-kegiatan penelitian di sektor tenaga kerja dan transmigrasi meliputi penelitian tingkat produktivitas tenaga kerja (khususnya angkatan kerja) di tingkat pedesaan, struktur sosial dan tradisi yang mempengaruhi tingkat produktivitas angkatan kerja yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur serta parameter biologis dan non biologis lainnya agar dapat diambil kebijakan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja ini.

Selain di tingkat desa, produktivitas tenaga kerja di kota yang berlainan corak kegiatannya dengan pedesaan perlu diteliti dalam rangka menciptakan iklim kerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Disamping itu, penelitian tentang bakat para pencari kerja untuk merumuskan kursus-kursus ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan kebutuhan pembangunan pada sektor-sektor lain.

Pada sub sektor transmigrasi penelitian yang dikerjakan adalah terutama yang menyangkut penentuan lahan transmigrasi (lingkungan fisik dan sosial).

Untuk penelitian dalam sub sektor daerah, desa dan kota adalah menyangkut penyempurnaan penyusunan karakteristik daerah pembangunan, penyempurnaan data-data potensi yang dimiliki tiap daerah, pola konsumsi pada tiap daerah dan kemungkinan peningkatan maupun perubahannya (khusus pengembangan pola konsumsi non beras dan perubahan pola konsumsi beras).

Sektor keagamaan diadakan penelitian tentang metode penyampaian penerangan agama, sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kegiatan pada sub sektor pendidikan meliputi penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi minat murid tentang pendidikan guru sebagai salah satu disiplin ilmu, khususnya murid pria.

Tentang peranan yang dapat diberikan oleh tamatan sekolah menengah kejuruan dan teknologi terhadap pembangunan daerah dan dampaknya bagi pembangunan nasional, diadakan penelitian pengembangan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja Paket A yang diintegrasikan dengan Pendidikan Mata Pencaharian.

Kegiatan penelitian sub sektor Generasi Muda dan Olahraga meliputi dekadensi olahraga di Daerah Maluku, penelitian peranan struktur anatomi tubuh manusia terhadap nomor-nomor mata lomba yang dikerjakan secara individual maupun beregu. Penelitian tentang pengembangan pendidikan program diploma sesuai dengan kebutuhan pendidikan umum dan kejuruan di tingkat pendidikan umum dan menengah. Penelitian tentang sikap mental generasi muda ditingkat pedesaan dan perkotaan serta aspirasi generasi muda itu sendiri dalam pembangunan daerah dan nasional. Penelitian tentang ketrampilan khusus yang sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan pembangunan Daerah. Penelitian kebudayaan nasional terutama untuk menggali potensi budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan yang telah hidup sejak jaman leluhur dalam masyarakat dan kaitannya dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penelitian sejarah khususnya yang menyangkut perjuangan masyarakat Maluku dalam usaha mengusir kaum penjajah.

Penelitian dalam sektor kesehatan mencakup penelitian tentang mutu obat dan makanan, penelitian tentang tingkat penggunaan obat-obatan terlarang dan obat bius khususnya dikalangan generasi muda. Juga penelitian tingkat kesadaran higienis masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk masalah penyakit menular dan usaha penanggulangannya, inventarisasi serta pengembangan obat-obatan tradisional dan lain sebagainya.

Kegiatan di sektor perumahan rakyat diadakan penelitian dan pengembangan bahan baku perumahan yang berasal dari Daerah Maluku, pengembangan standardisasi rumah rakyat (bentuk dan konstruksi serta jenis bahan bangunan yang sesuai dengan kondisi setempat), dan peningkatan lingkungan perumahan.

Dalam menyebarluaskan informasi, kegiatan penelitian adalah mempelajari cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam penyampaian

In the sub sector of air communication, research was undertaken on the subjects such as survey of airport construction/development and improvement of the facility and infrastructure of meterology and geophysics in the existing air traffic network.

In the sector of tourism, research should be taken in the archipelago of Molucca on tourism potential of sea/marine sites, especially on the underwater tourism.

The sectors of trade and cooperative was researched on development of marketing of the whole production sectors in the Province of Molucca. In this trade related research, activities include survey on consumer preference, packaging system, quality standard of commodities, and all other parameters in close relation with marketing network expansion.

In the subsector of cooperative, research was undertaken on the subjects about people's admittance and attitude on KUD (Village Unit Cooperative) to be viewed from the system of traditional values observed among the people, and people's social structure alternations. This kind of research was organized for the purpose to strengthen cooperative as an active institute to increase people's living standard. It also expects participation of the University of Pattimura.

Research activities on work force and transmigration include research on work force productivity especially villagers working group, social structure and tradition which influence work productivity, in relation on sec differences, degree of education, age and biological parameter, non-biologic parameter, so that policies can be taken to increase work productivity in this region.

Besides the rural subject, urban work productivity research should also be taken with its different environment to compare with the rural's, to create healthier and higer productivity. It is also important to do research on job seekers to analyse kinds of courses needed for training vocational skills according to their talent and development requirement.

In the subsector of transmigration, research was taken mostly on physical and social environment relating to the preparation of transmigration location.

Research in regional interest, village and city condition, was undertaken on the subjects related to improvement of condition of a development area, arrangement of potential data provided by each region, consumption condition in each region, possible improvement and diversification especially in consumption structure of non-rice staples and diversification of rice consumption).

In religious sector, research was undertaken on the methods of religious information deliberances, in accordance with the development of science and technology.

Activities in the sector of education include research on influencing factors to the pupils' interest on teaching education as one of the science discipline, especially on male pupils.

Research was also undertaken on the subjects of the role of the graduated pupils from vocational and technological schools towards regional development and the effect to the national development, also on the problems Parcel A Work Programme to be integrated with vocational training.

In the subsector of the younger generation and sport, research was undertaken on sport decadency in the Molucca region, on the role of anatomical structure of human body towards individual and group competitions in relation with the kinds of sport number. Research on the development of diploma programme (non-degree education) according to the need of general education and vocational education. Research on the younger generation mental attitude in rural and urban areas, and those young people aspiration to the regional and national development. Research on special ability in accordance with regional condition and development's demand. Research on the national culture, especially to develop cultural potential which reflects the noble values of the nation, beginning even from the ancestors time, and its relation to the belief in Almighty God and research on national struggle of the people in their effort to be free from colonial domination.

Research activities on health affair cover the subjects of food and medicine quality, drug addiction among the younger generation. Also on the subjects of consciousness of the people on health matters, especially among rural people. For contagious disease problem and its overcoming, research was undertaken on inventorization and development of traditional medicine and so son.

Activities in the public housing sector cover the subjects of housing raw materials produced in this region, improvement of public housing construction standard (design construction and kinds of materials in accordance with the related place), and improvement of neighborhood environment.

In information deliverance, research activities among others include subjects about more effective and more efficient ways in information deliverance, especially for the people living far away from information centres, rural people living in the remote islands, and local language influence toward information acceptance of the people.

informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang hidup pulau-pulau yang jauh dari pusat informasi dan pengaruh bahasa daerah terhadap kesempurnaan penerimaan informasi oleh masyarakat.

Kegiatan penelitian aparatur Pemerintah ditekankan pada produktivitas kerja Pegawai Republik Indonesia yang menyangkut disiplin kerja, fasilitas pelaksanaan tugas (khususnya pada daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kondisi perhubungan yang ada).

Kegiatan penyempurnaan dan pengembangan statistik ditekankan pada kemungkinan penggunaan teknologi komputer sebagai saran pengumpulan, penyimpanan serta pengolahan data, peningkatan ketrampilan petugas dalam penguasaan teknologi komputer (Computer Programming), penelitian cara-cara sensus yang efektif serta parameter-paramater sosial budaya yang mempengaruhi pelaksanaan sensus sesuai dengan tingkat kesadaran masyarakat.

Kebijaksanaan program-program di atas diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi sekitar 2,3% dalam peranannya sebagai penunjang pembangunan.

8. H u k u m

Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban, dan lebih memberikan dukungan/pengamanan kepada upaya pembangunan dalam mencapai kemakmuran.

Dalam pembangunan diarahkan untuk menyempurnakan usaha-usaha dan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan untuk memantapkan kedudukan dan peranan Badan-badan penegak hukum, sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, dan memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum, serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum sebagai aparat penegak hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu di Propinsi Maluku terus ditingkatkan, disamping meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan di bidang hukum.

Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu dilanjutkan langkah-langkah penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban azasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bertolak dari penegasan dan ketentuan GBHN di satu pihak dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku di lain pihak, maka pembangunan hukum di Maluku harus mencerminkan hukum sebagai suatu sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan hukum di Maluku harus dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha membangun masyarakat, baik fisik maupun spiritual.

a. Penegakan Hukum

Pembinaan penegakan hukum ditujukan untuk terciptanya kondisi yang mantap serta citra wibawa hukum, dalam memberikan dukungan kepada upaya pembangunan dan pembinaan penyempurnaan aparatur Pemerintah.

Pada umumnya penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Di Propinsi Maluku sisa perkara pidana tahun 1978 ditambah dengan yang masuk selama Pelita III sebanyak 10.495 perkara, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 10.259 perkara atau sebanyak 97,75%, sedangkan sisanya sampai dengan akhir tahun 1983 sebanyak 236 perkara atau 2,25%.

Jumlah perkara tersebut, jika dibandingkan dengan sisa tahun terakhir Pelita II sebanyak 341 perkara yang telah dilaksanakan, berarti terjadi penurunan sebanyak 3% pada akhir Pelita III.

Dilihat dari jenis tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan selama Pelita III, maka tindak-tindak pidana biasa menduduki urutan pertama sebanyak 176 perkara (74,5%), menyusul tindak pidana khusus sebanyak 27 perkara (11,44%), tindak pidana umum sebanyak 20 perkara (8,47%), sedang lainnya masing-masing kurang dari 5%. Lihat Tabel IV-24.

Perkara perdata yang masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi dan 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di Propinsi Maluku selama Pelita III

Research undertaken on the subject of Government apparatus was stressed to work productivity of the Republic of Indonesia workers, in relation to work discipline and facilities to carry out duties (especially in the areas having difficult communication condition).

Activities on statistics are directed to improving and developing statistic matters, on the possibility of computer usage for date collection, storage and processing, improvement of technical skills in computer programming for workers, on the more effective method of cencus, and other social cultural parameters influencing cencus according to he people's degree of awareness.

8. Legal Affairs

Development and promotion of legal affairs were directed to strengthen development result which had been achieved, to promote national stability so that every member of the community can feel a climate of social order, and better support the efforts of development to reach prosperity.

Judiciary renewal was directed to promotion of legal affairs; motivities include the codification and univication of laws in certain fields with the aim to cultivate judicial conscience among the people.

In enhancing the position and role of law enforcement bodies according to the function and authority of each, efforts have been launched to promote the attitude of the law personnel and their capability to increase image and prestige of judiciary personnel.

Arrangement of law assistancy and help for lower in come people in the Province of Molucca is still continuously increasing, beside infrastructures and facilities improvement needed to support development in legal affair.

Increase of judicial guidance is directed to reach higher degree of law conscience among the people, so that every member of the community will be conscious and sure about the rights and responsibilities as a member of a nation, in relation with the law uprightness, justice and protection of human dignity, social order and law certainty according to the 1945 Constitution.

In the efforts of national legal affair development, steps needed to be taken in the law formation relate to the rights and duties of a citizen in relation with the application of Pancasila and 1945 Constitution.

a. Law Enforcement

Law enforcement is directed to making a stable condition of the image and dignity of law to provide support in the development efforts and improvement of goverment apparatus.

In general law enforcement has been showing improvement of social order and law certainty among the people. In the Province of Molucca criminal cases in arrear in 1978 added with additional cases during Pelita III totalled 10,495 cases, where 10,259 of them can be judged, meaning 97,75%, whole the rest to the end of 1983 numbered 236 or 2.25%.

The total number of cases, to compare with the remainders at the end of Pelita II, as much as 341 cases had been solved, making a reduction as much as 32 at the end of Pelta III.

Seen from the type of criminality which cannot be solved during Pelita III, common criminality topped the list with 176 cases or 74.5%, special criminality 27 cases (11.44%), general criminality as much as 20 cases (8.47%), while the others each less than 5%. See Table IV - 24.

Civil cases filed and judged by the Appelate Court and 7 courts of justice in the Province of Molucca during Pelita III plus remnant cases of 1978 filed during Pelita II totalled 5,993 cases. The total number of cases judged were 5,089 or 84.92%. At the end of Pelita III the civil cases in arrear totalled 904 cases (15.08%).

Seen from the total cases filed to the end of 1984 in each of the courts of justice, it is found that the greatest number existed Ambon court of justice, followed by Ternate and Masohi. This condition was caused by vast jurisdiction areas and uneven distribution of population. The small number of cases filed by 4 other courts of justice was caused by high court fee, unreachable by justice seekers and lack of knowledge among the people about judicial court procedure resulting in so many cases cannot be judged in a court of justice. See Table IV - 25.

b. Prisoners Handling

The total number of arrests and prisoners handling by the Penitentiary institute during Pelita III showed a high enough figure i.e. 3,095 persons. About 54.62% of the total number were arrested persons, and the remaining 1,412 were prisoners. Among the number of the arrested persons, 771 were conditional arrest and the rest (921) were unconditional.

The prisoners &1,412) consist of 985 absolute imprisonment, and the rest were remisioned prisoners. This means that there was an improvement

Tabel / *Table IV — 24*

JUMLAH PERKARA TINDAK PIDANA YANG MASUK DAN DAPAT DISELESAIKAN KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI DI MALUKU DIPERINCI MENURUT JENIS TINDAK PIDANA SELAMA PELITA III

TOTAL NUMBER OF CRIMINAL CASES FILED AND JUDGED BY HIGHER PROSECUTION OFFICE/PUBLIC PROSECUTION OFFICE IN MOLUCCA BY TYPE OF CRIMINALITY DURING PELITA III

No	Jenis Perkara *Type of case*	Sisa Tahun 1978 *Carryover from the previous year of*	Masuk (1979—1983) *Filed (1979—1983)*	Diselesaikan (1979—1983) *Judged (1979—1983)*	Sisa 1983 *Cases in arrear 1983*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pidana Ringan/*Light crime*	—	5.756	5.756	0
2.	Pidana Biasa/*Common crime*	319	2.735	2.878	176
3.	Pidana Umum/*General crime*	—	512	497	20
4.	Pidana Khusus/*Special crime*	8	117	98	27
5.	Imigrasi/*Imigrasi*	—	8	6	2
6.	Insidentil/*Incidental*	9	57	55	11
7.	Pidana Rol/Khusus/ *Special Roll Crime*	5	969	974	0
8.	Lainnya/*Others*				
	Jumlah / *Total*	341	10.154	10.259	236

Sumber : *Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku*
Source : Higher Prosecution Office, Molucca.

menunjukkan sisa perkara tahun 1978 yang masuk selama Pelita III berjumlah 5.993 buah. Sedangkan jumlah perkara yang dapat diputuskan sebanyak 5.089 perkara (84,92%). Pada akhir Pelita III jumlah sisa perkara yang tidak diputuskan sebanyak 904 perkara (15,08%).

Dilihat dari jumlah perkara yang masuk sampai akhir tahun 1984 untuk masing-masing Pengadilan, ternyata jumlah perkara terbanyak terdapat di Pengadilan Negeri Ambon, kemudian Ternate dan Masohi.

Hal ini disebabkan wilayah hukum yang terlalu luas (kedudukan geografis) dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Kecilnya jumlah perkara seperti ternyata pada keempat Pengadilan lainnya, dikarenakan faktor biaya perkara yang tidak dapat dijangkau oleh pencari keadilan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur penyelesaian perkara sehingga banyak perkara yang tidak bisa diproses melalui Pengadilan. Lihat Tabel IV-25.

b. Pembinaan Narapidana

Jumlah tahanan maupun narapidana yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan selama Pelita III menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 3.095 orang. Dan 54,62% dari jumlah tersebut terdiri dari para tahanan, sedangkan sisanya sebanyak 1.412 orang adalah narapidana. Jumlah tahanan sebanyak 1.683 orang, terbagi lagi atas tahanan bersyarat 771 orang dan tahanan tetap 912 orang.

Narapidana sebanyak 1.412 orang terdiri dari 985 orang nara pidana mutlak, sedangkan yang sisa berstatus narapidana yang mendapat remisi. Ini berarti bahwa ada perubahan sikap mental pada narapidana yang mendapat berkelakuan baik. Lihat Tabel IV-26.

Untuk menampung jumlah para tahanan dan narapidana yang meningkat itu, dalam Pelita III telah ditingkatkan kapasitas daya tampung Lembaga Pemasyarakatan dari 1.538 menjadi 2.038 orang. Kapasitas tampung selama Pelita II hanya 745 orang. Selain peningkatan daya tampung, dilakukan pula usaha-usaha para tahanan dan napi melalui pendidikan/latihan ketrampilan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Imigrasi selama Pelita III di Maluku berkisar pada segi pengawasan dan penelitian masalah perpanjangan paspor, ijin wisata, ijin tinggal kunjungan, pencabutan warga asing/Cina, pemeriksaan lalu lintas wisata melalui pelabuhan udara Pattimura maupun pelabuhan laut Ambon dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan tersebut pada awal Pelita III (1979) sebanyak 1.853 buah meningkat menjadi 2.352 buah. Terjadinya peningkatan ini karena pada dua tahun terakhir Pelita III arus lalu lintas wisatawan meningkat melalui angkutan kapal laut/pelabuhan Ambon.

Jika dilihat dari masing-masing jenis kegiatan, maka 15.192 buah ternyata kegiatan lalu lintas wisatawan menempati urutan pertama sebesar 35,18% menyusul KIM/S sebanyak 20,15%. Ijin tinggal wisata 13,06%, pencabutan warga negara asing/Cina 11,7% dan sisanya masing-masing kurang dari 5%. Lihat Tabel IV-27.

Tabel / *Table IV — 25*

JUMLAH PERKARA PERDATA YANG MASUK DAN YANG DAPAT DIPUTUSKAN PENGADILAN TINGGI DAN 7 PENGADILAN NEGERI SELAMA PELITA III DI MALUKU DIPERINCI MENURUT WILAYAH

NUMBER OF CIVIL CASES FILED AND JUDGED BY THE APPELATF COURT AND 7 COURTS OF JUSTICE IN MOLUCCA BY DISTRICT DURING PELITA III

(x 1 orang)

No	Wilayah Hukum *Jurisdiction Area*	Perkara Gantung 1978 *Carry-over from 1978*	Perkara Masuk 1979-1983 *Filed case 1979-1983*	Diputuskan 1979 - 1983 *Judged* 1979-1983	Gantung 1979-1983 *In-Arrear 1983*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengadilan Tinggi	64	636	743	57
2.	Pengadilan Negeri Ambon	26	3.123	2.763	386
3.	Pengadilan Negeri Ternate	25	707	601	131
4.	Pengadilan Negeri Masohi	127	304	308	123
5.	Pengadilan Negeri Tual	1	120	100	21
6.	Pengadilan Negeri Tobelo	17	463	343	46
7.	Pengadilan Negeri Labuha	17	151	139	29
8.	Pengadilan Negeri Soa Siu	19	193	101	111
	Jumlah / *Total*	296	5.697	5.089	904

Sumber : *Pengadilan Tinggi Maluku*
Source : The Appelate Court of Molucca.

of mental attitude among prisoners who had shown a good conduct. See Table IV - 26.

In view of the increasing number of imprisonment, lodging capacity of the Penitentiary Institute during Pelita III had been expanded from 1,538 to 2,038. Lodging capacity during Pelita II were only for 745 persons. Beside such capacity improvement, guidances were given for the inmates, the arrested and the prisoners, in vocational training.

Imigration activities during Pelita III in Molucca include supervision and research on problems of passport extention, tourism permit, visitor's stay permit, change of nationalty of foreign descendants/Chinese, observation of tourism traffic in Pattimura Airport or Ambon Harbour, etc.

All of the activities at the beginning of Pelita III (1979) numbered totally 1,853 times to be increased in the last two years of Pelita III to 2,352 times, because of increasing number of tourist traffic through Ambon airport and Harbour.

Seen from the type of activities, 15,192 times were for tourism. It was the first rank of activities, (35.18%) from the total), followed by KIM/S or stay Permit/Temporary (20.15%). Change of nationality of foreign descendants/Chinese (11.7%) came after Tourist stay Permit (13.06%) and the rest less than 5% each. See Table IV-27.

c. Promotion of the Judiciary

To promote equal opportunity in judiciary service and protection of law, simplication had been taken and also accelerated in judicial processes with judicial fee within reach of justice seekers from all walks of life.

Beside construction/expansion/rehabilitation of court of justice buildings, penitentiary-institutes, Immigration offices and official houses, court rooms were also provided with the purpose to make judiciary service closer to the people in remote areas.

For this sake, during Pelita III works had been undertaken for the construction of 3 court buildings, 3 penitentiary institutes, 1 immigration office, 3 unit court rooms, official house and expansion of 3 court offices. See Table IV - 28.

From physical facility point of view, it is clear that the existing facilities will not suffice to guarantee a smooth judiciary service, correct and simplified with lower court fee within reach of Justice seekers among the lower income.

9. Security and Public Order

Development in the field of security and public order in the Province of Molucca was favourable due to solution of basic obstacles through various policies in national and regional development.

In the effort to promote political life founded on Pancasila and 1945 Constitution, improvement and socialization of P4 (Guide To Enlightment and Application of Pancasila) had been realized as people's political education, through education, upgrading and other efforts.

Although BP-7 personel in all districts are still insufficient to carry out programmes, this strategic sector had succeeded to be realized in a systematic

Tabel / *Table IV — 26*

JUMLAH TAHANAN DAN NARAPIDANA YANG DIBINA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN SELAMA PELITA III DIPERINCI MENURUT JENIS GOLONGAN

TOTAL NUMBER OF THE ARRESTED PERSONS AND PRISONERS HANDLED IN THE PENITENTIARY INSTITUTE DURING PELITA III DESCRIPTION IN KIND OF IMPRISONMENT

(x 1 orang/*person*)

No	Tahun *Year*	Tahanan *Arrested*		Nara Pidana *Prisoner*		Jumlah *Total*	Keterangan *Remark*
		Bersyarat *Conditional*	Tetap *Unconditional*	Napi *Prisoners*	Remisi *Remision*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1979	114	132	172	116	532	)* Termasuk orang asing *Incl. foreigner*
2.	1980	154	166	207	108	635	
3.	1981	150	186	214	107	657	
4.	1982	170	189	151)*	52)*	562	
5.	1983	183	239	241	44)*	707	
Jumlah/Total		771	912	985	427	3.095	

Sumber : *Kanwil Bina Tunawarga Departemen Kehakiman Maluku.*
Source : Regional Office of Citizenship Destitute of the Department of Justice, Molucca.

c. *Pembinaan Peradilan*

Menuju ke arah perwujudan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, telah diadakan usaha-usaha menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan dibarengi dengan biaya yang dapat dijangkau oleh para pencari keadilan dari seluruh lapisan masyarakat.

Selain pembangunan/perluasan/rehabilitasi gedung Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi dan rumah-rumah dinas, disiapkan pula tempat-tempat sidang dalam rangka mendekatkan Badan Pengadilan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Sehubungan dengan itu selama Pelita III telah dibangun 3 buah gedung pengadilan, 3 buah gedung lembaga pemasyarakatan, 1 buah kantor imigrasi, 3 unit ruang sidang, sejumlah rumah dinas serta perluasan 8 buah kantor pengadilan. Lihat Tabel IV-28.

Dilihat dari segi jumlah, sebenarnya sarana fisik sebagaimana tergambar di atas belum dapat sepenuhnya memungkinkan terwujudnya peradilan yang cepat, tepat dan lebih sederhana dengan biaya yang terjangkau oleh pencari keadilan yang kurang mampu. Karena itu perlu ditingkatkan pengadaan sarana fisik dalam Repelita IV.

9. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Propinsi Maluku semakin mantap, karena telah dapat dibenahi beberapa hambatan pokok yang dibenahi melalui berbagai kebijaksanaan pembangunan nasional maupun regional di berbagai bidang.

Dalam upaya memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah dilaksanakan peningkatan dan perluasan usaha pemasyarakatan P4 dalam pendidikan politik rakyat melalui pendidikan, penataran dan usaha-usaha lainnya.

Walaupun aparat pelaksana BP7 di semua Daerah Tingkat II belum memadai, namun penanganan sektor yang sangat strategis dan mendasar ini telah dapat dilaksanakan secara lebih sistematis. Berikutnya dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983, maka pemasyarakatan P4 kepada masyarakat luas telah semakin dapat digalakkan.

Semua ini dilakukan dalam usaha untuk lebih mempercepat wujud masyarakat Pancasila dan dalam rangka memantapkan eksistensi Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa.

Pelaksanaan pemasyarakatan P4 telah ditempuh dengan mempergunakan methode penataran, dengan beberapa pola yaitu pola 120 jam, pola pendukung 45,25 dan 17 jam, serta methode-methode lainnya antara lain Penataran Permainan Simulasi P4 dengan mempersiapkan segala fasilitas-fasilitas untuk itu.

Khusus untuk pola pendukung 17 jam, dilaksanakan sesuai INMENDAGRI Nomor 9 tersebut dengan sasaran masing-masing 5.000 penatar telah menghasilkan percepatan pemasyarakatan P4 ini kepada masyarakat di Propinsi Maluku.

Penataran P4 untuk anggota masyarakat telah diselenggarakan pola 120 jam untuk 560 orang, pola 45 jam untuk 652 orang, pola 25 jam untuk 3.131 orang dan pola 17 jam untuk 4.521 orang. Dan Penataran P4 kepada Pegawai Negeri telah diselenggarakan Type A untuk 4.772 orang, Type B untuk 14.608 orang dan Type C untuk 7.678 orang.

Tabel / *Table IV — 27*

VOLUME KEGIATAN IMIGRASI AMBON SELAMA PELITA III DIPERINCI MENURUT JENIS KEGIATAN

ACTIVITIES OF IMMIGRATION IN AMBON DURING PELITA III BY TYPE OF ACTIVITY

(x 1 orang)

No	Jenis Kegiatan *Type of Activity*	Tahun/*Year* 1979	1980	1981	1982	1983	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Perpanjangan Paspor/ *Passport Extension*	108	142	152	171	293	866
2.	Izin tinggal wisata/ *Tourist Stay Permit*	389	475	623	227	270	1.984
3.	Izin tinggal Kunjungan/ *Visitor's Stay Permit*	180	346	53	144	181	904
4.	KIM/S/ *Stay Permit/Temporary*	905	859	534	393	370	3.061
5.	Exit permit/*Exit Permit*	111	100	118	96	88	513
6.	Meninggal Dunia/*Dead*	8	19	17	5	14	63
7.	Pencabutan WNA/Cina/ *Revocation of Nationality/ Chinese*	54	344	453	378	548	1.777
8.	Lalu lintas Wisata Pesawat Udara/*Tourist traffic by airplane*	98	124	152	190	116	680
9.	Lalu lintas Wisata Kapal Laut Pelabuhan Ambon/*Tourist traffic by ship/Ambon Harbour*	—	—	—	4872	472	5344
	Jumlah / *Total*	1.853	2.409	2.102	6.476	2.352	15.192

Sumber : *Kantor Imigrasi Ambon Departemen Kehakiman, Maluku*
Immigration Office Ambon, Department of Justice, Regional Office, Molucca.

Tabel / *Table IV — 28*

KEADAAN SAPANA PERADILAN DI MALUKU SAMPAI DENGAN AKHIR PELITA III DIPERINCI MENURUT WILAYAH HUKUM

JUDICIARY FACILITIES IN MOLUCCA AT THE END OF PELITA III, BY JURISDICTION AREA

No Urut	Wilayah Hukum *Running number*	Jumlah Sarana Peradilan *Total number of judicial facilities*	Keterangan *Remark*
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kejaksaan Tinggi/ *Higher Prosecution Office*	1 buah	
2.	Kejaksaan Negeri/ *Public Prosecution Office*	5 buah	
3.	Cabang Kejaksaan Negeri/ *Branch of Public Prosecution Office*	15 buah	
4.	Pengadilan Tinggi/ *The Appelate Court*	1 buah	
5.	Pengadilan Negeri/ *Court of Justice*	7 buah	
6.	Tempat Sidang/*Court Rooms*	19 buah	
7.	Lembaga Pemasyarakatan/ *Penitentiary Institutes*	16 buah	
8.	Balai Harta Peninggalan (BHP)/ *Hall of Inheritance Property*	1 buah	
9.	Kantor Imigrasi/ *Immigration Office*	2 buah	

Sumber : *Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku*
Source : Higher Prosecution Office, Molucca.

way. More over, with Minister of Home Affair Instruction (INMENDAGRI) No 9 of 1983, P-4 socialization to the whole people can be intensified.

All of these were done to accelerate Pancasila community realization in the scheme to uphold the existence of Pancasila as National ideology and National Life Outlook.

Realization of P4 socialization had been undertaken through upgrading methods with several designs such as : 120 hours degisn, supporting design of 45 hours, 25 hours and 17 hours, and other methods such as P4 simulation game with preparation of all facilities for it.

Supporting design of 17 hours method in particular had been realized according to the INMENDAGRI No 9 of 1983 mentioned above with the target of 5,000 tutors and had resulted in enhancing P4 socialization in the Province of Molucca.

Penataran untuk Permainan Simulasi P4 untuk Pengelola 8 orang, pelatih inti 10 orang, pelatih 456 orang dan fasilator sebanyak 485 orang.

Untuk pelaksanaan Penataran P4 Pola Pendukung 17 jam sesuai INMENDAGRI Nomor 9 tahun 1983, dilaksanakan perincian sbb.: (1) Daerah Tingkat II Maluku Utara sebanyak 50 angkatan dengan jumlah peserta 5.156 orang = 102,13%; (2) Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sebanyak 50 angkatan dengan jumlah peserta 5.276 orang = 105,48%; (3) Daerah Tingkat II Maluku Tengah sebanyak 27 angkatan dengan jumlah peserta 2.517 orang = 50,34%; (4) Kotamadya Ambon sebanyak 50 angkatan dengan jumlah peserta 5.142 orang = 100,35%. (5) Jumlah seluruhnya 18.089 orang yaitu 90,45% dari target 20.000 orang.

Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan politik adalah usaha pembauran bangsa. Sesuai dengan arti pembauran dan assimilasi itu sendiri sebagai warga negara, kita semua berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin agar supaya Bangsa Indonesia menjadi suatu Bangsa yang besar, bulat dan utuh dimana unsur-unsur yang mempersatukan Bangsa itu sama sekali tidak terpecah belah, tidak pula terkotak-kotakan, tidak tercerai-berai karena perbedaan suku, ras keturunan, agama, latar belakang kebudayaan, bahasa pergaulan daerah, adat istiadat, keyakinan politik dll.

Sehubungan dengan itu telah dilakukan usaha pembinaan organissi BAKOM PKB Propinsi sebagai alat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa yang menghendaki adanya peran serta aktif seluruh anggota masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, khususnya di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku.

Selain pembinaan dari segi kelembagaan, telah pula dilaksanakan Penataran Penghayatan Kesatuan Bangsa. Lihat Tabel IV-29.

Dengan pelaksanaan program yang baik telah tercipta kondisi stabilitas dan politik, keamanan dan ketertiban di daerah ini yang cukup mantap, sehingga memungkinkan terselenggaranya pembangunan di sektor-sektor lain, terutama di sektor ekonomi yang hasil-hasilnya sudah semakin dapat dirasakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah ini.

Keselarasan dan keserasian hubungan kerja antara eksekutif dengan Badan-badan Legislatif pada semua tingkatan dapat dicatat sebagai indikator utama adanya stabilitas sosial politik di daerah ini. Keadaan yang demikian telah memberikan peluang yang besar bagi Pemerintah untuk mengeksploitasi berbagai kemungkinan yang ada, baik masih tersedia secara potensial maupun yang sudah bertumbuh secara menefes merupakan kekuatan nyata, untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil nyata dari peluang besar yang telah dapat dimanfaatkan Pemerintah adalah meningkatkan pendapatan per kapita rakyat di daerah ini.

Hal lain yang dapat dicatat sebagai indikator keberhasilan pendidikan politik adalah kesadaran politik rakyat, terutama kesadaran akan hak dan kewajiban berpolitik melalui Pemilihan Umum. Pemilu 1971, 1977, dan 1982 yang lalu di daerah ini telah berlangsung dengan aman dan tertib, serta benar-benar telah berlangsung di atas azas LUBER yang telah membuahkan hasil-hasil yang semakin memperkokoh perjuangan Orde Baru bagi tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945.

10. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Selama Pelita III kegiatan penerangan lebih dititikberatkan pada upaya melibatkan warga desa dalam ikut membahas masalah-masalah warga desanya dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi sosial yang ada.

Upaya pemanfaatan saluran komunikasi sosial ini dimaksudkan untuk menampung masalah-masalah nasional, regional, maupun daerah, dengan memberikan bobot yang lebih besar pada usaha menciptakan iklim yang dapat menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat tentang hakekat manfaat dan pembangunan.

Peranan Kepala Desa bersama aparat Pemerintahan desanya dan opinion leader di desa, sangat menentukan lancarnya komunikasi timbal balik dalam arti dapat memperjelas informasi yang diterima untuk disampaikan kepada masyarakat baik melalui media; surat kabar, radio, televisi maupun film termasuk berbagai media tradisional yang ada.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu terus ditingkatkan sistem penerangan terpadu dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi tradisional maupun berbagai media elektronika modern yang ada seperti radio, televisi, film, pers, Punpenmas dengan serambi depannya, Bakohumas, Bapfida, LKMD dan lain-lain sebagainya.

a. Operasional Penerangan

Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam mensukseskan pembangunan, selama Pelita III dan Pelita sebelumnya telah dilaksanakan

P4 tutoring for the people had been realized as follows : 120 hours design for 560 persons, 45 hours design for 652 persons, 25 hours design for 3,131 persons and 17 hours design for 4,521 persons.

P4 upgrading for civil servants had been realized as follows : Type A for 4,772 members, Type B for 14,608 members and Type C for 7,678 members.

Upgrading with simulation game had been realized for Managers 8 persons, Coach Master 10 persons, Coach 456 persons and facilitators 485 persons.

Description of P4 tutoring design of 17 hours according to INMENDAGRI No. 9 of 1983 was as following : 1. North Molucca totally 50 groups with total number of 5,156 followers or 102.13% of target; 2. Southeast Molucca totally 50 groups with total number of 5,276 = 105.48%; 3. Central Molucca totally 27 groups with total number 2,517 followers = 100.35%, and 5. The grand total becomes 18,089 or 90.45% of the target Of 20,000 followers.

Other activities with no less importance in political development is national assimilation. According to the meaning of assimilation itself, as member of the nation, we ought to be in duty with maximal efforts of that Indonesia as a nation will become great, and there is no element of division, unimpaired or scattering because of differences in tribe, race, ethnic, religion, cultural background, local dialects, tradition, political belief and so on.

In relation to it, guidance had been provided for the creation of BAKOM PKB organization (Communication Board for the Promotion of National Unity). The provincial office is a tool to support the government or regional office in the effort to promote national unity. It invites active participation of the whole members of the community for the sake of development realization, especially in the Province of Molucca.

Beside guidance in institutional form, tutoring on nationalism had been realized in provincial level, for 375 persons out of the expected number of 5,252. See Table IV - 29.

Tabel / *Table IV — 29*

DAFTAR PENATARAN PENGHAYATAN KESATUAN BANGSA TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU SELAMA PELITA III
LIST OF TUTORING ON NATIONALISM AT PROVINCIAL LEVEL IN THE PROVINCE OF MOLUCCA, DURING PELITA III

No	Tahun *Year*	Jumlah yang ditatar *Number of participants*	Lokasi *Location*
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	1980/1981	50 orang	Ambon
2.	1981/1982	50 orang	Ternate
3.	1982/1983	150 orang	Ternate, Soasio, Tual
4.	1983/1984	125 orang	Ternate, Tual
Jumlah / *Total*		375 orang	

With such perfect realization of programmes, the creation of political stability had been achieved, with security and public order in this region affirmed. To make possible the realization of development for other sectors, especially in economic sector, with apparent result in improving people's prosperity in this region.

Harmony and conformity in interaction between executyve and legislative bodies at all level can be noted as main indicator of the existence of social stability and political stability in this region. This condition of stability has created a greater opportunity for the government to expolit various existing possibility, either in form of potential deposit or already growing and manifesting as a real power, to be used for people's prosperity can be seen in the increase of people's income per capita in this region.

Another factor worthy to cite as indicator of political education success is the people's political consciousness, in particular on their rights and duties of political life, through General Election. General Elections in 1971, 1977 and 1982 in the region already happened under peaceful and orderly conditions, and truely happened under principles of LUBER, yielding results which strengthen the struggle of New Order for the sake of Pancasila and 1945 Constitution affirmation.

10. Information, the Press and Social Communication

During Pelita III, information activities were focused on the efforts to carry on the villagers to participate in their own villagers problems with utilization of various social communications.

The efforts to utilize social communication line as mentioned were aimed to reserve all national problems, regional or local, with greater emphasis on the effort to create a climate conducive to the growing up of understanding

berbagai kegiatan operasi penerangan di daerah Maluku dengan kegiatan pemutaran film, penerangan tatap muka, penerangan melalui siaran radio, diskusi, ceramah, pertunjukan rakyat, pameran, forum-forum pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat, kelompok-kelompok organisasi massa, termasuk kegiatan penerbitan.

Dalam menunjang kelancaran kegiatannya, pembangunan sarana dan prasarana fisik penerangan sampai akhir Pelita III meliputi pembangunan dan perluasan gedung-gedung Pusat Penerangan Masyarakat Kotamadya Ambon, Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara yang dilengkapi dengan berbagai sarana penerangan termasuk 4 buah rumah dinas.

Untuk menciptakan pemerataan arus penerangan bagi seluruh golongan masyarakat, serta memungkinkan rakyat yang belum mampu dapat mengikuti acara-acara siaran, maka sampai dengan akhir Pelita III telah disalurkan televisi umum sebanyak 679 buah, radio casette recorder sebanyak 420 buah kepada masyarakat desa dan kelompok organisasi yang berada di desa dan penanganannya dipercayakan kepada Kepala-kepala desa.

Disamping itu telah disalurkan pula 37 unit Muviani Darat dan 25 unit Muviani Air beserta kelengkapannya, termasuk 164 buah generator, dan 1 set mesin perekam scanner untuk peningkatan penerbitan pemerintah. Kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa agar lebih terbuka menerima pesan-pesan penerangan pembangunan.

Dalam meningkatkan arus dan volume penerangan kepedesaan melalui media elektronika, khususnya media radio sampai akhir Pelita III sudah dibentuk sebanyak 751 kelompok siaran pedesaan yang meliputi Kabupaten Maluku Utara 380 kelompok, Kabupaten Maluku Tengah 294 kelompok, Kabupaten Maluku Tenggara 48 kelompok, dan Kabupaten Kodya Ambon 34 kelompok.

Tanpa mengurangi peranan dari media pers maupun elektronika, maka penerangan yang paling efektif terutama bagi masyarakat pedesaan untuk menanamkan keyakinan dan menggerakkan masyarakat adalah komunikasi tatap muka, sarasehan, ceramah, diskusi, pameran dan pertunjukan rakyat.

Khusus mengenai Pertunjukan Rakyat, dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki sifat komunikatif, akrab dengan rakyat. Dengan memakai sarana tersebut, dapat membuka cakrawala untuk menciptakan komunikasi timbal balik atau mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Dilihat dari fungsi sebagai sarana penerangan, kegiatan Pertunjukan Rakyat mengandung unsur pendidikan, hiburan, dan informasi. Bila ketiga unsur ini saling menyatu dalam alur cerita atau pertunjukan yang mengasyikan, sehingga merupakan media penyampaian sesuatu pesan. Untuk kegiatan Pertunjukan Rakyat di Propinsi Maluku, sudah ditunjang oleh satu mobil pentas yang lengkap dengan peralatannya.

Sarana dan prasarana pendukung lainnya yang mendukung untuk menunjang kelancaran operasional penerangan, antara lain melaksanakan pembangunan gedung Puspenmas 5 buah, Balai Penerangan Kecamatan 2 buah, pengadaan Muviani Darat maupun Air lengkap dengan peralatan audio visual aidsnya sebanyak 40 buah (Muviani Darat) dan 25 buah (Muviani Air).

b. R a d i o

Walaupun media elektronika seperti TVRI sudah dapat menjangkau sebagian masyarakat, namun media radio di Propinsi Maluku masih mendapat tempat yang cukup dominan dikalangan masyarakat. Apalagi dengan adanya realisasi Instruksi Menteri Penerangan RI tertanggal 11 September 1983, tentang siaran RRI yang berada di udara selama 24 jam.

Kelebihan dari media radio terletak pada kekuatan daya pancar dengan sistem bergelombang, sehingga walaupun terhalang oleh gunung, namun daya jangkaunya tidak terhalang, malahan dapat menembus sampai ke pelosok pedesaan.

Peningkatan aktivitas penerangan melalui radio, baik yang ditujukan ke Pusat maupun Daerah supaya dapat memberikan gambaran baik secara nasional maupun regional kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai kegiatan pembangunan. Sejalan dengan maksud tersebut, juga harus ditingkatkan mutu, isi dan teknik penyiaran yang dilaksanakan selama ini.

Produk-produk siaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan volume maupun materi yang ditetapkan oleh Direktorat Radio Departemen Penerangan RI meliputi: Siaran Penerangan 25%, Siaran Pendidikan 20%, Hiburan 45%, dan Siaran lain-lain 10%, dengan jumlah keseluruhan 168 jam per minggu.

Sampai akhir Pelita III, peningkatan sarana dan prasarana radio untuk menjangkau masyarakat yang terisolir menggunakan peman-

and consciousness of the people about the advantage and importance of development.

The role of village heads with the administration staff together with rural opion leaders will become the most decisive point in deciding the smoothness of mutual communication, in the sense of enlightening the information received to be given to the people, either through newspapers, radio television, film, the press, PUSPENMAS or Centre of Public Information with its front verandah, Bakohumas, or the Coordinating Body for Public Relation, Bapfida or Regional Body of Film Development, LKMD or the Institute for Rural Community Resilience.

a. Information Operation

To gain increasing participation of the people during Pelita III and before for the sake of development, various information operational activities had been realized in the Molucca region, such as : film, face-to-face communication, radio programmes, discussion, seminars, traditional drama, exhibition, meeting occasion with community figures, group of mass organizations, and especially in publication eactivities.

To enhance the activities, development of infrastructure and facilities of information to the end of Pelita III covered the construction and expansion of PUSPENMAS Centre of Public Information, buildings in Ambon Municipality, District of North Molucca, Central Molucca, Southeast Molucca, completed with various information facilities, including 4 official houses.

To create the equity of information flow for the whole people, and to make the lower income people be able to follow the programmes parcels, until the end of Pelita III public TV sets totalled 679 sets, radio cassette recorders totalled 420 sets had been provided for the villagers and organizations/groups in the villages.

37 units of Muviani (land) and 25 units of Water Muviani together with its equipments were already provided, including 164 generator sets, and 1 set of scanner recorder to improve government's publishing condition. All of these activities had been taken to increase people's capability in the villages to be more open in receiving development information messages.

In promoting of the flow and volume of information for rural people through electronic media, particulary radio, to the end of Pelita III, as much as 751 listeners groups of rural broadcasting had been created, covering the District of trict of North Molucca 380 groups, District of Central Molucca 294 groups, Southeast Molucca 48 groups and Ambon Municipality 34 groups.

Without trying to reduce the role of the printed medium or electronic one, the most effective method of information, particularly for rural people, to implant conscience and to motivate the people is face-to-face communication on method, meeting, seminars, discussion, exhibition and traditional drama.

Traditional drama in particular can be said to possess communicative characters, and is close to the people. With the use of such media, the open climate for mutual communication can be created to expand people's participation in the national development.

As the function of information means, people's drama contains educational element, entertainment and information. When these three elements become united in a story or an attractive drama or play, then appears a medium functioning as information deliverer. To enhance people's drama activities in the Province of Molucca, 1 unit Stage car complete with its equipments has been provided.

Infrastructures and facilities have been built to enhance information operations, among others the construction of 5 Puspenmas buildings (Public Information Centres), Subdistrict Information Hall (2 buildings), availability of Land Muviani and Water Muviani complete with its audiovisual aid equipments totalled 40 (Land Muviani) and 25 units (Water Muviani).

b. Radio

Eventhough electronic media such as TV already reach the greater part of the people, radio still in dominates in the Province of Molucca. Radio domination is strengthened by the Minister of Information Instruction date 11 September 1983 about non-stop programme of RRI (Raio of Republic of Indonesia) round-the-clock (24 hours daily).

Additional advantage of radio is its wafe-length system of transmission power. It is not subject to obstruction by mountains; its widespread will not be interrupted to reach out the whole rural areas.

The increase of information activities by radio, serving both the central government or the regional area, can give pictures nationally as well as regionally to the whole people about development activities. In accordance with such a purpose, the quality of the information material and its deliverance technique, ought to be improved.

Broadcasting products were in conformity with volume and materials provided by the Directorate of Radio, Information Department RI, covering

car sebanyak 16 buah. Radio casette recorder (RCR) milik Departemen Penerangan yang diserahkan kepada masyarakat sebagai radio umum sebanyak 420 buah, dengan perincian: tahun 1980/1981 (150 buah), tahun 1981/1982 (150 buah), dan tahun 1983/1984 (120 buah). Untuk membantu penyebarluasan siaran-siaran pemerintah di Kotamadya Ambon dan sekitarnya tercatat 4 buah Radio Swasta.

c. *Televisi*

Sampai akhir Pelita III, selain stasiun pemancar di Kodya Ambon. Juga terdapat 7 buah pemancar televisi dengan peralatan **Television Reciver Only** (TVRO) yang berlokasi di Soa Sio, Ternate, Tual, Dobo, Namlea, dan Morotai dengan rata-rata pemancar dibawah 1 KW.

Komponen peralatan elektronika yang mendukung, meliputi 1 unit Stasiun Produksi Keliling dengan 3 buah kamera, 1 buah mobil generator kapasitas 25 KVA lengkap dengan peralatan lighting. Stasiun ini mulai beroperasi sejak Maret 1984 lalu, dengan salah satu paket yang memperkenalkan tentang kebudayaan daerah.

Produk-produk SPK Ambon yang tercatat sebagai Juara Nasional pada Pelita IV tahun ke—III, mempunyai paket siaran yang terdiri dari: Paket Siaran Seni Budaya (78 Paket), Berita Pendidikan (4 Paket), Berita Olahraga (1 Paket), dan Berita Penerangan meliputi: Berita Harian (341 Topik), serta Berita Berkala (29 Paket).

Untuk mempercepat informasi melalui media televisi di Propinsi Maluku pada tahun 1985 tercatat jumlah pesawat televisi umum yang ditempatkan di desa-desa sebanyak 2.258 buah dan pesawat televisi milik masyarakat yang terdaftar pada Kantor Pos sebanyak 3.883 buah. Lihat Tabel IV-30.

: information broadcast 25%, education broadcast 20%, entertainment 45% and other kind 10% with total broadcasting of 168 hours a week.

To the end of Pelita III, the development of infrastructures and facilities of Radio media to reach the isolated people, realized 16 units of transmitters. RCR or Radio Cassette Recorders owned by the Information Department were given to the people as public radio totalled 420 units, with description : 1980/1981 150 units, 1981/1982 150 units and 1983/1984 120 units. To assist the widespread of government broadcast in Ambon Municipality and its surrounding area, there are 4 private broadcasting stations in Ambon.

c. *Television*

To the end of Pelita III, beside central TV station in Ambon, there exist 7 more TV stations with TVRO equipments (Television Receiver Only) located in Soasio, Ternate, Tual, Dobo, Namlea and Morotai, with less than 1 KW capacity each.

Supporting electronic devices components include : 1 mobile unit of production station with 3 cameras, 1 unit of mobile generator with capacity 25 KVA complete with lighting equipments. This station began to operae since March 1984, with a parcel of production about regional culture.

Ambon TV station products were once cited as National Winner in the third year of Pelita IV, among other with the parcels of : Cultural Programme (78 parcels), Education News (4 parcels), Sport News (1 parcel) and Information News consist of Daily News (341 topics) and Continouos News (29 parcels).

To enhance information distribution through television media in the Province of Molucca in 1985, registered public TV sets placed in the villages totalled 2,258 sets, TV sets owned by the people registered at Post Office totalled 3,883 sets. See Table IV - 30.

Tabel / *Table IV — 30*

JUMLAH PESAWAT TELEVISI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR POS PROPINSI MALUKU MENURUT DATI II TAHUN 1985
NUMBER OF TV SETS REGISTERED AT POST OFFICES IN THE PROVINCE OF MOLUCCA, BY DISTRICT, 1985

Bulan *Month*	Kotamadya Ambon *Municipality Ambon*	Maluku Tengah *Central Moluccas*	Maluku Tenggara *Southeast Moluccas*	Maluku Utara *North Moluccas*	Halmahera Tengah *Central Halmahera*	Jumlah *Total*
Januari/*January*	92	29	14	51	9	195
Pebruari/*February*	91	33	10	32	4	170
Maret/*March*	101	23	5	40	4	173
April/*April*	100	29	1	40	—	170
M e i/*May*	156	34	3	91	7	291
Juni/*Jun*	277	30	2	33	—	341
Juli/*July*	116	34	11	19	4	184
Agustus/*August*	187	30	10	34	—	261
September/	431	36	21	31	4	523
Oktober/*October*	156	19	34	35	5	249
Nopember/*November*	178	32	486	24	7	727
Desember/*December*	315	23	442	10	8	798
Jumlah / *Total*	2.200	352	839	440	52	3.883

Sumber : *Maluku Dalam Angka Tahun 1985.*
Source : Molucca in Figures, 1985

d. F i l m

Mengenai sarana perfilman sampai akhir Pelita III terdapat 25 buah pengusaha film di Maluku. Kotamadya Ambon ada sebanyak 9 buah, Maluku Tengah sebanyak 6 buah (Tulehu, Masohi, Kairatu, Banda, Wahai), Maluku Utara sebanyak 6 buah (Kotamadya Ternate) dan Halmahera Tengah sebanyak 6 buah (Soa Sio).

Selain itu terdapat Video Rental sebanyak 29 pengusaha yang berlokasi Kotamadya Ambon sebanyak 14 pengusaha, Maluku Utara 4 pengusaha (Ternate), Maluku Tenggara 11 pengusaha (Elat, Dobo, Larat), tiap bulan rata-rata Cassette Video yang masuk tercatat 200 sampai dengan 300 judul meliputi film-film nasional, Mandarin dan Eropah/Amerika.

Langganan rata-rata sebanyak 50 - 100 orang (1 sampai dengan 2 judul per hari) untuk tiap pengedar video cassette.

e. P e r s

Pembinaan dan pengembangan Pers di Maluku didasarkan pola pers yang bebas dan bertanggungjawab, yaitu adanya keseimbangan antara kebebasan menyatakan pendapat dan kesadaran serta bertang-

d. *Film*

There were 25 film theatres in the Province of Molucca to the end of Pelita III.

Besides there are 29 Video Rentals distributed as follows : Ambon Municipality 14 shops, North Molucca 4 shops : Ternate, Southeast 11 shops. Monthly incoming of video Cacassettes to the province were registered to 200 titles consist of national films, Mandarin films and Europe/American films.

Consumer proportion about 50-100, in 1 to 2 titles a day, for every shop.

e. *The Press*

Guidance and improvement of the Province of Molucca was based on the design of free with responsible press, i.e. with a balance proportion between freedom to express opinions and consciousness and responsibility to promote national stability.

Guidance to the press was stressed on the improvement of press quality, facilities and production. To gain such a result, mutual cooperation and assistance were created between journalists in this region with the Office

DAERAH JANGKAUAN SIARAN TELEVISI DI MALUKU

DAERAH TINGKAT I

PROPINSI MALUKU

SKALA: 1 : 6.400.000

KETERANGAN :
- IBUKOTA PROPINSI
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN
- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN

P.MOROTAI
BARE-BARE
DARUBA
DARUME
MINAHASA
KEDI
GALELA
TONGOTISUNGA
TOBELO
SEPUPU
KAO
LOLOBATA
TERNATE
JAILOLO
SARAMAAKE
SOASIU
BULI
P.HALMAHERA
NGOFAKIAHA
MABA
WEDA
GURUAFIM
PAYAHE
PATANI
MAFA
SAKETA
LABUHA
P.BACAN
KEP.SULA
LAIWUI
BCEONG
DOFA
P.OBI
SANANA
IRIAN JAYA
P.SERAM
TANIWEL
WAHAI
P.BURU
PIRU
MASONI
TEHORU
BULA
AIR BUAYA
KAIRATU
NAMLEA
AMAHAI
SAPARUA
WERINANA
GESER
LEKSULA
AMBON
PELAU
NEIRA
KEP.BANDA
TUAL
ELAT
DOBO
KEP.KEI
LARAT
KEP.ARU
KEP.BABAR
KEP.TANIBAR
P.WETER
WONRELI
TEPA
SAUMLALKI
SERWARU
TIMOR-TIMUR



Daerah yang sudah ada stasiun TVRO



TVRO yang belum beroperasi

gungjawab untuk turut memantapkan stabilitas nasional.

Pembinaan pers dititikberatkan kepada peningkatan mutu pers, sarana dan produksi. Untuk mencapai hasil tersebut selain diadakan kerjasama Deppen dengan wartawan-wartawan di daerah, juga semua instansi Pemerintah dan pihak swasta lainnya di daerah.

Untuk meningkatkan ketrampilan dan spesialisasi baik jurnalistik maupun aparat yang berhubungan dengan pelaksanaan pers, diadakan berbagai latihan, pendidikan/penataran, serta pertemuan diklat manajemen pers yang menghimpun unsur PWI dan SPS.

Sampai akhir Pelita III untuk menunjang kelancaran pengembangan pers di daerah selain Percetakan Negara juga terdapat 9 buah Percetakan Swasta yang berlokasi di Kotamadya Ambon. Dalam usaha meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, telah masuk berbagai agen surat kabar dari pusat maupun daerah.

Hingga akhir Pelita III tercatat keadaan persuratkabaran daerah adalah Mingguan Nasional oplaag 3.000 eksemplar, dan Mingguan Berita Yudha 3.000 eksemplar, Mingguan Sinar Harapan 2.000 eksemplar, Mingguan Duta Masyarakat 2.000 eksemplar, Mingguan Surat Maluku Ternate 2.000 eksemplar, Mingguan Pos Maluku oplaag 5.000 eksemplar. Khusus Mingguan Pos Maluku sejak bulan Maret 1982 telah terbit sebanyak 13.000 eksemplar yang terdiri dari 8 halaman khusus untuk Koran Masuk Desa.

Dalam hubungan kerjasama dengan Penerbit Surat Kabar di daerah sebanyak 763 buah press release dari Kanwil Deppen termasuk Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya dan Jupen Kecamatan, telah dimuat pada surat-surat kabar yang terbit di kota Ambon.

Sebagai embrio dari Koran Masuk Desa, sejak Pelita III oleh Departemen Penerangan telah dirintis Penerbitan Khusus Untuk Daerah Pedesaan (PKUDP) dan Surat Kabar Untuk Desa. (SKUD). Tujuan lain dari penerbitan ini untuk menunjang kelanjutan usaha pemberantasan buta huruf gaya baru yang mencakup buta aksara, buta angka dan buta bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar.

Selain penerbitan-penerbitan pers yang dihasilkan oleh Kanwil Departemen Penerangan beserta seluruh jajarannya di Propinsi Maluku juga diterbitkan Surat-surat Kabar Mingguan lokal/daerah antara lain: Pos Maluku sebagai pelaksana KMD (5.000 eksemplar), Berita Yudha (3.000 eksemplar), Nasional (5.000 eksemplar), Sinar Harapan (3.000 eksemplar), Duta Masyarakat (1.500 eksemplar), dan Suara Maluku (1.250 eksemplar).

Melihat tantangan yang cukup berat bagi penerbitan surat-surat kabar di daerah ini dengan masuknya berbagai media pers dari Pusat yang membanjiri Maluku, bila dikaitkan dengan usaha meningkatkan kemampuan membaca berdasarkan standar yang ditetapkan UNESCO (10 pembaca = 1 surat kabar), kehadiran surat kabar pusat dinilai cukup efektif.

Surat kabar dari pusat yang beredar di Propinsi Maluku sebagai berikut: Kompas, Jakarta (750 eksemplar), Merdeka, Jakarta (2.000 eksemplar), Sinar Harapan, Jakarta (500 - 700 eksemplar), Jawa Pos, Surabaya (350 eksemplar), Surabaya Minggu, Surabaya (300 eksemplar), Mingguan Tribune Olahraga, Jakarta (4.000 eksemplar), Mingguan Pos Film, Jakarta (300 eksemplar), Mingguan Olahraga Bola, Jakarta (750 eksemplar), Suara Karya, Jakarta (219 eksemplar), Majalah Tempo, Jakarta (425 eksemplar), Majalah Bulanan Inti Sari, Jakarta (100 - 150 eksemplar), dan lain-lainnya.

Disamping itu ada pula Surat Kabar untuk desa yang langganannya dianggarkan dalam DIP Proyek Operasi Penerangan Propinsi Maluku, beroperasi mulai 1 April 1984/1985 dan seterusnya untuk tahun anggaran 1985/1986, 1986/1987 masing-masing 150.000 eksemplar per tahun (500 eksemplar) per hari.

of Information Department as well as between all government instances and private institutions in this region.

To increase capability and professionalism among journalists and personnel related to press production, various education/upgrading/training and press management courses were organized, covering elements of PWI (Indonesian Journalist Association) and SPS (Association of Press Publishers).

To the end of Pelita III, in support of press development acceleration in this region, there were 1 government printing office, together with 9 private printing houses, located in Ambon. To increase people's reading habit, especially among villagers, penetration had been taken by nespapers' agents from central state or regional nespapers.

To the end of Pelita III condition of the regional press were as follow : National Weekly circulation 3,000 copies, Berita Yudha Weekly 3,000 copies, Sinar Harapan Weekly 2,000 copies, Duta Masyarakat Weekly 2,000 copies, Suara Maluku Ternate Weekly 2,000 copies, Pos Maluku Weekly 5,000 copies. For Pos Maluku Wekkly in particular, for the purpose of KORAN MASUK DESA or rural newspaper edition (KMD), it had been printed 8 pages form with 13,000 copies.

During the period of Pelita III the total number of press releases produced by the Regional Office of Information Department, including Sub-district and District offices of that Information authority, Ambon Municipality Information Office, including Sub-district and District offices of that Information authority, Ambon Municipality Information Office and Sub-district Infomation staff, as much as 763 press releases had been printed on the newspapers published in Ambon Municipality.

As an embryo of rural newspaper edition, since Pelita III the Information Department had published a special publication for village area (PKUDP). Other purposes of this publication include support to the programme of eraicating illiteracy as well as ignorance on.
In the Province of Molucca, newspaper availability is also supported by local/regional publications such as : Post Maluku with 5,000 copies, Berita Yudha (3,000 copies), Nasional 5,000, Sinar Harapan 3,000, Duta Masyarakat, 1,500 and Suara Maluku 1,250 copies. All of them are weekly publications.

To overcome the great challenge faced by these regional newspapers to reach the standard of reading ratio among the people, i.e. 10 readers = 1 newspaper, the incoming of newspaper published by Jakarta publishers, can be accepted as effective enough.

Newspapers from outside circulating in this region are as follows : Kompas, Jakarta, 750 copies; Merdeka, Jakarta, 2,000 copies; Sinar Harapan, Jakarta, 500-700 copies; Jawa Pos, Surabaya, 350 copies; Surabaya Minggu, Surabaya, 300 copies; Tribune Olahraga Sport Weekly, Jakarta, 4,000 copies; Pos Film Weekly, Jakarta, 300 copies; BOLA, Sport Weekly, Jakarta, 750 copies, Suara Karya, daily, Jakarta, 219 copies; TEMPO, Weekly magazine, Jakarta, 425 copies; INTISARI, magazine, monthly, Jakarta, 100 - 150 copies; and so on.

Beside all of those publications mentioned above, there is also newspaper for villagers, with some budgetary aid from the Information Operation Project of The Province of Molucca. It began operation since 1 April 1984/1985, and for the budgetary year of 1985/1986 and 1986/1987 were published each year about 150,000 copies, or 500 copies daily.

B A B / *CHAPTER V*

MALUKU DALAM TANTANGAN DAN HARAPAN

MOLUCCA: THE CHALLENGE AND THE HOPE

PEMBANGUNAN di Maluku samasekali bukanlah merupakan mimpi indah. Daerah ini masih mengalami banyak tantangan yang sampai kini masih membutuhkan putra-putra terbaik yang mau bekerja keras demi keberhasilan pembangunan di Propinsi Seribu pulau ini. **Adanya impian masyarakat Maluku** untuk segera memperoleh fasilitas-fasilitas umum yang memadai adalah wajar dalam tahapan pembangunan **sekarang ini.** Namun terlebih dahulu perlu dipahami daerah ini ternyata mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan Propinsi lainnya di Indonesia.

Luas daratan dan lautan adalah 10 : 90. Iklim dilautan juga memberi warna tersendiri karena sifat laut Maluku hanya sewaktu tertentu saja dapat diajak kompromi. Hanya 4 bulan keadaan laut di Maluku tidak dilanda gelombang ganas dan besar. Dari keadaan demikian dapat dibayangkan betapa sulitnya transportasi di daerah ini, dan betapa besar tantangan dihadapi. Masyarakat Maluku memimpikan suatu transportasi angkutan laut yang lancar, jalan-jalan yang mulus dan sarana serta prasarana yang lebih memadai. Nampaknya impian tersebut sebagian sudah terpenuhi melalui tahapan Pelita di Propinsi Maluku, sekalipun masih banyak tantangannya namun harapan sebenarnya sudah terbuka luas. Demikian inti wawancara Tim Indonesia Membangun **Sahat Nainggolan, Asmi Indra** dan **Hardi** dengan Ketua BAPPEDA **Drs Akip Latukonsina** di Ambon medio Pebruari 1987.

Lebih jauh Ketua Bappeda Propinsi Maluku, menjelaskan maluku mempunyai ciri-ciri khusus. Dia menyebut beberapa masalah yang dihadapi daerah ini dalam pembangunan antara lain: Potensi wilayah, tenaga kerja dan kependudukan, fasilitas dan prasarana, geografis, dan adat istiadat/sosial budaya.

Disamping kesamaan-kesamaan itu, ada juga perbedaan-perbedaan yang disebabkan faktor-faktor tadi atau disebabkan kenyataan-kenyataan yang ada.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut **Akip** menjelaskan lebih jauh mengenai konsepsi dan prinsip-prinsip dasar kebijaksanaan pembangunan nasional yang berkaitan dengan pembangunan daerah secara umum. Seperti Kebijaksanaan Anggaran, GBHN, Repelita, dan faktor-faktor perencanaan.

1. Beberapa Masalah Pokok

Lalu dia melihat untuk daerah Maluku, disamping terikat kepada masalah pokok nasional yang juga merupakan masalah pokok setiap daerah, maka program-program nasional yang pasti realisasinya ke daerah besar kecilnya tergantung kepada kondisi daerah, kondisi daerah ini yang merupakan hal utama yang mewarnai seluruh program yang ada. Program-program tersebut diisi dengan proyek-proyek setiap tahun anggaran oleh berbagai sumber biaya tersebut diatas.

Kondisi Maluku dari segi geografisnya memang berpotensi ekonominya, yang sangat tinggi. Tetapi faktor itupun masih meninggalkan beberapa masalah pokok.

Pertama, masalah perhubungan, masalah ini sudah diketemukan sejak Pelita I, dan untuk Pelita IV sudah tercatat hasil-hasil positif yang banyak, tapi diakui belum tuntas. Sehingga dalam Pola Dasar I, II dan Repelita-repelita lainnya, semua hal ini tetap tercantum pada masalah pokok.

Masalah pokok yang lain diketemukan dalam sumber daya manusia, secara kuantitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan. Aspek lainnya yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata. Ada beberapa pulau berpenduduk padat ada pula yang jarang. Kepadatan rata-rata penduduk Maluku ialah 17 jiwa per kilometer bujur sangkar.

Jika Pulau Jawa memiliki kepadatan 700 s/d 800 jiwa per—Km bujur sangkar, Maluku seperti di Ternate, lebih dari 1.000 orang per—km bujur sangkar. Tapi ada pulau-pulau lain seperti Wetar (Maluku Tenggara), hanya 1 orang per—Km bujur sangkar.

Masalah utama bagi Maluku sesungguhnya menyangkut perhubungan terkait dengan luas wilayah memencar di banyak pulau, sukar dijangkau, dan mahal. Masalah kedua ialah masalah penduduk dan tenaga kerja.

Masalah pokok di bidang perhubungan secara teknis di Propinsi Maluku seperti dijelaskan oleh **Akip** 4 hal, antara lain :

a. Pra sarana dan Sarana Perhubungan di Propinsi Maluku relatif masih kurang.

DEVELOPMENT in Molucca is not at all a nice dream. This region still faces so many challenges, which until today still need the best hands who are willing to work hard for the sake of the success of the development of this Thousand Islands Province. The existence of Moluccan's expectation to soon gain the general facilities sufficient for their living condition is natural in this stage development nowadays. Yet at the first time it ought to be considered that in fact this regional condition owns a particular character to compare with other provinces in Indonesia.

Proportion of land and water area is 10 : 90. Sea climate is also in a different colour, because of the character of Molucca which only in a certain season can be invited to compromise. Only 4 months along the year which is not thundered by wild and mightly waves. From such a condition, it can be imagined about the difficulty of transportation condition in this region, and what a challenge they meet! Moluccans do dream about a sea transportation in a smooth condition, prompt and smooth roads, infrastructures and facilities in a better condition. It seems that part of the dream had been realized through the steps of Pelita on the Province of Molucca, eventhough the challenges are still a lot yet the hope in fact is already open habroadly.

*That is the essence of conversation between the INDONESIA MEMBANGUN editorial team **(Sahat Nainggolan, Asmi Indra** and **Hardi)** with Chief of BAPPEDA (Regional Planning Board) of the Province of Molucca. **Drs Akip Latukonsina** in Ambon, in February 1987.*

The chief explained that Molucca possesses a special characters. He talked about problems faced in this region in the development, among others: regional potential, work force, population, facility, infrastructure, geographical problems, and socio-cultural tradition.

Beside such factors, in compari[illegible]n with other region's problems, differences exist caused by the mentione[illegible] by the existing facts.

Based on those problem[illegible] explained continually about conception, and basic policy principles [illegible]tional development in relation with regional development in general; s[illegible]h as budgeting policy, GBHN, REPELITA or Five years Development Plan, and planning factors.

1. Some Basic Problems

*Then **Mr Akip** reviewed Molucca region. Beside tied to the national basic problems which are also basic problems of every region in this state, greater or less amount of realization depends on the regional condition. And then this regional condition becomes the main factor influencing the whole programmes. All of the programmes are fulfilled with projects in every budgetary year with various sources of financing.*

Molucca condition in view of the geographic position really possesses very high economic potential. But this factor depends upon several basic problems.

***First,** transportation. This problem was discovered since Pelita I and Pelita IV has registered positive result although it is acknowledged as not yet absolutely solved. So in the Basic Design of Pelita I, II and other Repelita, this transportation problem is still regarded as a basic problem.*

The second problem was found in human force resources, which quantitatively and qualitatively ought to be improved. The other aspect is uneven distribution of population. There are crowded islands but also some islands with rate population. Population density of Molucca is 17 souls per Km², Molucca such as Ternate is crowded by more than 1,000 souls/Km². But there some other islands like Wetar island in Southeast Molucca with only 1 souls/Km².

The real basic problem for Molucca is actually its transportation related with the regional area spreading to so many islands, difficult to reach and expensive. The second problem is population problem and work force.

*Basic problems in the field of transportation in the Province of Molucca was technically explaned by **Akip** consisting of 4 cases as follows:*

a. Infrastructures and facilities of transportation in the Province of Molucca were relatively ill-provided.

b. The existence of infrastructures and facilities was just concentrated to the small islands.

This condition as tied to the population problem. To recall from history, beginning from Sultan Tidore, Sultan Ternate and Sultan Bacan and even

b. Pra sarana dan Sarana Perhubungan yang ada terkonsentrasi pada Pulau-pulau kecil. Hal ini ada juga kaitannya dengan masalah kependudukan. Kalau dilihat dari sejarahnya, mulai dari Sultan Tidore, Sultan Ternate, dan Sultan Bacan, dan bahkan VOC, semuanya bercokol di Pulau-pulau kecil di Maluku.

Pulau Ternate yang luas pulaunya hanya 65 Km, adalah wilayah Sultan Ternate. Pulau Tidore dengan luasnya hanya 67 Km merupakan wilayah Sultan Tidore, dan pulau Bacan dengan sultannya Bacan, serta pulau lainnya.

c. Belum ada suatu Pola Perhubungan yang terpadu

Misalnya perhubungan laut sebagai inti pokok perhubungan laut sebagai inti pokok perhubungan di Maluku tidak ditunjang oleh adanya jaringan-jaringan jalan dari perhubungan darat, lapangan terbang, dan telekomunikasi. Sehingga masing-masing jalan itu tidak saling menunjang. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya fungsi tugas Perhubungan Laut, terlalu berat dan tidak ekonomis dan memerlukan waktu yang panjang menuju titik akumulasi. Sebab potensi dan struktur ekonomi Propinsi Maluku, lebih mengarah pada sektor perdagangan. Dengan demikian untuk produksi terbesar dari Maluku, sebagian besar dari produk perdagangan, baik untuk ekspor maupun impor.

d. Fungsi prasarana dan sarana perhubungan dewasa ini umumnya baru berada pada fase pengembangan dan belum sampai ada fase penunjang sektor lain.

2. Pertanian dan Perikanan Laut

Maluku pada akhir Pelita III menghasilkan karbohidrat ± 196 kilo per kapita. Hanya 5% dari padanya berasal dari beras, 25% dari sagu, 24% dari ubi-ubian, dan sisanya dari jagung dan pisang-pisangan. Ikan juga merupakan primadona Propinsi Maluku. Konsumsi rata-rata per kapita sudah mencapai 49 kg. Sedang untuk rata-rata nasional hanya sekitar 14 kg per kapita.

Sedangkan untuk Produksi Tanaman Pangan Propinsi Maluku, belum bisa diandalkan untuk perdagangan sekarang ini. Di Ternate walaupun banyak sagu, belum bisa dijual. Dengan demikian produksi tanaman pangan di Maluku, hanya dipakai untuk konsumsi lokal saja. Untuk pendapatan daerah, diarahkan ke perkebunan dan perikanan.

Perkebunan Propinsi Maluku cukup bagus, dapat menghasilkan kelapa/kopra sebesar 150.000 ton per tahun, Cengkeh 8.000 s/d 10.000 ton per tahun, coklat 5.000 ton per tahun. Khusus Coklat sudah di ekspor dari Halmahera senilai 7 juta US dollar.

Pada sektor perkebunan di Maluku ini ada hal yang menarik, semua milik rakyat dan tidak ada perkebunan-perkebunan besar, baik swasta maupun pemerintahan. Pemda mencegah jangan sampai ada penguasaan tanah besar-besaran di Propinsi Maluku, tapi diinginkan Pola PIR dan NES karena terbatasnya lahan. Pola PIR dan NES itu, memang betul-betul diinginkan supaya secara konsekwen dapat dilaksanakan di Propinsi Maluku.

Di sektor Perikanan Propinsi Maluku, potensinya diperairan sudah mencapai sebesar tiga kali lipat dari rata-rata nasional. Hal ini diambil contoh, laut Banda yang terkaya di Asia/Pacifik. Setiap bulan ada saja pencuri-pencuri ikan bangsa asing diperairan Maluku. Kebanyakan mereka dari negara-negara Taiwan dan lainnya yang letaknya berdekatan dengan kepulauan Indonesia.

Potensi wilayah laut Propinsi ini sebesar 1,9 juta ton ikan, yang dapat dihasilkan dari perairan sekitar Maluku. Berarti sekarang ini, baru bisa dihasilkan ± 5% dari potensi alamiah, atau ± 89% dari potensi lestari. Sedang dari 5% saja, sudah dapat menghasilkan konsumsi per kapita yang besar. Tapi untuk mengolah laut Banda secara besar-besaran, tidak mungkin hanya menggunakan kole-kole (perahu layar), jala secara tradisional semua tidak mungkin. Dengan demikian untuk mengolah laut secara besar-besaran, memerlukan tingkat teknologi tinggi. Disini harus pula memerlukan tingkat ketrampilan penguasaan ilmu maritim, ilmu kelautan bagi Indonesia. Oleh karena itu, perlu letakkan dasar yang kuat mulai sekarang.

Untuk maksud tersebut, diharapkan melalui suatu Akademi Maritim, Akademi Pelayaran, Akademi Perikanan dapat menanggulangi semua kebutuhan pembangunan perikanan di Propinsi Maluku.

Melihat potensi dan kondisi Propinsi Maluku para pejabat Propinsi ini berambisi untuk memusatkan Akademi Pelayaran, Akademi Perikanan, Akademi Pertanian, dan Akademi Maritim di kota Ambon. Meskipun pulau-pulaunya lebih kecil namun hutan di Maluku ada seluas 6 hektar (70% dari luas daratan). Propinsi Maluku sudah selesai menghimpun "Pola Hutan Kesepakatan" atau "Pola Tata Guna Hutan Kesepakatan". Didalamnya sudah ada laporan yang membagi hutan produksi, wisata dan berbagai jenis yang dikehendaki Departemen Kehutanan. Sekitar 3,6 juta hutan produksi di Maluku, dan 12 pabrik playwood. Bahkan Propinsi ini memiliki pabrik playwood

VOC - Verenigde Oost Indische Compagnie - Company of East HINDIA, colonial authority of Indonesia before independence, all prefered to stay in small islands in Molucca.

Ternate island with an area of only 65 Km² was due region of former Sultan Ternate. Tidore with only 67 Km² was the region of former Sultan Tidore, Bacan island was that of Sultan Bacan and so on.

c. *Inadequate transportation scheme*

Sea transportation as the souls element of Molucca transportation is not supported by the existence of road network of land transportation, or airport and telecommunication. Thus, every line seems to be in self-running, not in a mutual support condition. Moreover, the sea transportation function becomes overburdened and economically inadequate, requiring a long time towards accummulation point.
Because the province of Molucca is economically potential and the structure is pointing towards trading sector, Molucca highest products must come from trading products, either for export commodities or imported goods.

d. *Infrastructures and facilities of transportation in general are still in the phase of improvement, not yet well-developed to support other sectors.*

2. Agriculture and Marine Fishery

Molucca at the end of Pelita II produced carbohydrate about 196 Kg per capita. Only 5% of it came from rice, 25% from sago, 25% from tubery materials, the rest were from maize and banana. Fish is also a primadona of the Province of Molucca. The rate of consumption already reached 49 Kg, while the national rate was only 14 Kg per capita.

Food crops production in the Province of Molucca appears inadequate nowadays as a trade commodity. In Ternate a lot of sago is produced but cannot be sold. So food crops production is just for local consumption. For regional income, attention is given to farming and fishery.

Farming in Molucca is prospective, able to produce copra/coconut as much as 150,000 ton yearly, clove 8,000 to 10,000 ton per year, chocolate 5,000 ton per year. Chocolate has been exported from Halmahera as much as 7 million US $ in value.

Ther are some attractive condition in this farming sector, i.e. that all are possessed by the people, without any bigger farming, neither government-owned not private's. The provincial administration prevents any land occupation in the region for such bigger farming, but demands also PIR—Smallholders' Nucleus Estates design (NES) because of the limitation of the land provided. The PIR or NES design is really prospectful, to be realized in the Province of Molucca.

In the Fishery sector, its water potential has already reached a rate of exploitation averagely three times from the national rate. For example, the Banda Sea is the richest in marine fishery potential in Asia/Pasific region. Every month illegal catchers appear constantly in Moluccas waters, mostly from Taiwan and other places close to Indonesian Archipelago.

The territorial water potential is about 1.9 million ton of fish. It means that nowadays real production just reached 5% from its natural potential. With a bare 5% production, the people can gain so high degree of consumption per capita.

It is impossible to exploit the Banda Sea in a large scale using only ***"kole-kole"*** *(Small canoe) with traditional net. So to exploit that sea property in the large scale, widely and broadly, it needs a higher degree of technology, acquisition of maritime technology, and marine technological science for Indonesia. A firm foundation ought to be put for such realization.*

It is expected that through Maritime Academy, Shipping Academy and Fishery Academy, the need of fishery development requirements can be fulfilled in the Province of Molucca.

In consideration of the potential and condition of the province, the regional administration is ambitious to concentrate on the development of the Shipping Academy, Fishery Academy, Agricultural Academy, and Maritime Academy in Ambon.

Although consisting of smaller islands, forest in Molucca happens to be as greater as 6 million Ha or 70% from the total land area. The Province of Molucca has drawn the "Design of Agreement Forest" or "Design of Utility Order of Agreement Forest", assigning production forest divisions tourism forest division and so on, according to the diversification given by the Forestry Department.

With around 3.6 million Ha of Molucca production forest, this province has 12 plywood manufacturers. Even it owns the largest in Asia Plywood manufacturer in Seram Island. This "Seram plywood Industry" possesses HPH—The Right of Forest Exploitation (forest concession), about 1 million

di Pulau Seram yang terbesar di Asia Tenggara.

"Seram Playwood Industries" saja memiliki HPH 1 juta hektar. Mereka membangun pula pabrik lem sendiri. Pemda Maluku memberikan ijin mengekspor langsung dari pelabuhan ke pabriknya.

Dua belas playwood di Maluku memerlukan paling tinggi 2 juta meterkubik kayu log. Padahal Propinsi Maluku memiliki 2,6 juta hektar hutan. Dan hutan-hutan ini setelah diteliti bisa menghasilkan antara 20 s/d 60 meterkubik kayu log dalam setahun. Apalagi kalau "Tebang Pilih Indonesia" secara konsekwen dapat dilaksanakan maka akan terjamin suplai bahan baku untuk plywood.

Industri perkayuan ini sudah barang tentu merupakan sumber mata pencaharian baru yang penting bagi Maluku.

3. Mulai Dari Laut

Meskipun pemecahan masalah perhubungan belum seluruhnya tuntas namun dari berbagai usaha pembangunan selama ini banyak pula dicapai hasil yang positip. Sebagai contoh seperti dijelaskan Ketua Bappeda Propinsi Maluku, jalan darat pada akhir Pelita II baru ada sepanjang 1.116 km yang hanya 300 km beraspal, pada tahun 1986 tercatat sudah lebih kurang 2.200 km jalan dengan 1.000 km jalan beraspal.

Diperkirakan saat ini Maluku masih membutuhkan sekitar 500 km lagi jalan beraspal terutama mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak. Seram Timur masih memerlukan 100 sampai 200 km. Pulau Buru untuk memotong jazirah Selatan ke Utara membutuhkan 200 km jalan baru. Halmahera demikian juga perlu lingkar.

"Propinsi Maluku sesungguhnya sudah dapat bersyukur dengan 2.200 km panjang jalan yang ada sekarang. Dan itu tidak disangka" kata Akip Latukonsina.

Akan tetapi dia lebih lanjut menjelaskan masalah yang masih mengganjal bagi Daerah ini ialah Perhubungan Laut yang sekaligus merupakan hal yang khas bagi daerah ini.

"Untuk Perhubungan Laut barangkali Daerah Tingkat II di Indonesia yang paling banyak membutuhkan dermaga dan armada laut ialah Maluku", katanya. Dan itu memang mahal!

Dibanding dengan Riau yang daerahnya juga memiliki daerah kepulauan hanya membutuhkan beberapa dermaga laut untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah penting. Maluku untuk itu memerlukan tidak kurang 74 dermaga laut. Dan sampai dewasa ini sudah berhasil dibangun sebanyak 53 buah. Sungguh suatu prestasi besar! meskipun sesungguhnya lebih banyak diantaranya berupa dermaga kayu. Hanya ada tiga buah yang permanen. Dengan bantuan dari Negeri Belanda sedang dibangun empat buah. Untuk lokasi-lokasi baru ada 12 buah yang sedang diteliti.

Pola perhubungan laut dewasa ini peranan armada perintis ada lima line Maluku Tenggara dan dua line untuk Namlea. Hubungan antar pesisir pantai banyak ditangani oleh perusahaan swasta dan masyarakat. Di Maluku Tengah umumnya penduduk memiliki kapal begitu juga Ternate, Sanana, dan Namlea. Dan Akip setengah menjanjikan Pemerintah akan berusaha mempertahankan pola pelayaran rakyat ini. Sebab peranan mereka secara riel sungguh besar dalam menghidupkan perekonomian daerah dan menjangkau daerah-daerah terpencil.

Dalam hal perhubungan udara melalui APBD Pemerintah Daerah berhasil membangun 17 buah lapangan terbang. Yang dibiayai dengan APBN hanya pelabuhan udara di Ambon dan Ternate. Ke 17 buah lapangan terbang tersebut dapat dihubungkan dengan Cassa dan Twin Otter. Dari ke 17 buah lapangan udara itu ada 14 yang sudah memiliki LLS dan berarti masih dibutuhkan tiga buah lagi untuk Kisar dekat Tim Tim Dobo dekat Pulau Kei Besar, dan di Weda, Maluku utara.

LLS untuk Kisar cukup mendesak sebagai penghubung wilayah Timur Indonesia sebagai wilayah Pengembangan E (Maluku, Irian Jaya dan Nusa Tenggara Timur). Kalau Kisar dapat difungsikan secara maksimal dapat menarik pesawat perintis dari Manado, Ternate, Ambon, Tual, Saumlaki lalu langsung ke Dilli, Kupang, dan Surabaya. Begitu juga dengan perhubungan laut, dalam rangka menunjang perekonomian Wilayah Pengembangan Indonesia Timur dikaitkan dengan Surabaya dan bukan dengan Ujung Pandang atau Manado.

Sesuai dengan kondisi alamnya pembangunan di Propinsi Maluku memang senantiasa harus dimulai dari laut. Dan dalam kaitan itu sektor perhubungan sangat dominan, karena 90% luas wilayah Propinsi Maluku adalah laut dan 10% lagi daratan. Walau 10% terdiri daratan, tapi ada 85.000 Km persegi lebih luas daratannya. Sedangkan lautannya 700.000 Km persegi lebih. Sebagian besar desa-desa di Propinsi Maluku terletak di tepi pantai, sedikit sekali di gunung. Jadi kesana kemari yang dijumpai hanya laut. Itulah sebabnya orang sering menyebut Propinsi Maluku didominir oleh laut. Ini artinya rakyat memang hidup dan kehidupannya banyak ditentukan atau diliputi oleh laut. Berbagai hasil dari laut, diperoleh seperti ikan dan lain-lainnya. Tapi bila laut sedang surut, walau ikan tidak ada masih ada kerang yang dapat dimakan.

Ha. It builds its own glue manufacturing. The regional administration permits it to export its products.

Twelve plywood industries in Moluccas require at most 2 million M3 logwood, while the province's property is about 2.6 million Ha of forest. And this forest, after researched, has a capacity of 20 to 60 million M3 logwood per year. Moreover, if the policy of "Selective Cutting Indonesia" can precisely be realized, the material supply of logwood can be guaranteed for those plywood industries.

These wood industries become a new source of living for the Moluccans.

3. Beginning from the Sea

Eventhough solution of transportation problem is yet to be reached, in various development endeavors many positive achievements have been acquired. As explained by the Chief of BAPPEDA (Regional Planning Board) of the Province of Molucca, roadways at the end of Pelita II only had 1,116 Km, where only 300 Km paved, in 1986 it increased to 2,200 Km with 1,000 Km paved. Molucca today needs about 500 Km more of paved roadways, especially to overcome a pressing demand. Eastern Seram needs 100 to 200 Km, Buru Island to cut the Southern peninsula on to the Northern are with 200 Km of new construction. Halmahera needs a ring road-way.

The Province of Molucca actually ought to be gratefull with the existing 2,200 Km roadway nowadays. And that comes unexpectedly, said ***Akip Latukonsina.***

But, he explained further, the problem for this region is the sea transportation, which has special significance for this region.

" For sea transportation, may be a regional area in Indonesia which demands the greatest number of harbours and shipping vessels is Molucca", he said. And that is really expensive.

To compare with Riau in Sumatra, which also posseses a vast sea area, which needs only several harbours to reach other important destination, Molucca for the same purpose needs no less than 74 harbours. And until today about 53 harbours have been constructed. It is really a big achievement, although a lot of it are wood construction. Only three are permanently built. With the aids of the Netherlands, 4 harbours (under construction) have been constructed. And there are 14 locations, there under research.

In the scheme of sea transportation, thre area 5 shipping lines for Namlea. Inter-beach relations exist mostly by private's lines and the poeple themselves. In Central Molucca people generally posses ship, so with those in Ternate, Sanana and Namlea, And Akip disclosed that the government will try to defed such people's line design, because of their real role is great to enliven this regional economic life and to reach remotest areas.

In the case of air transportation, through ABPRD (Regional Budget), the Regional Administration has succeeded to construct 17 airports. Financed by APBN (National Budget) are only 2 airports, i.e. in Ambon and Ternate. The 17 airports mentioned area able to be landed by Cassa type and Twin Otter type planes. From those 17 airports mentioned, 14 are already with LLS equipments and needed 4 sets more for Kisar airport near East Timor, Dobo near Kai Besar island and Weda airport in Norther Molucca.

LLS equipment for Kisa is badly needed as a connector of Eastern region of Indonesia, in the Development Region E (Molucca, Irian Jaya and East Nusa Tenggara). be able to attract pioneering airline planes from Manado, Ternate, Ambon, Tual, Saumlaki and directly to Dilli, Kupang and Surabaya.

Just like the case of sea transportation, in the structure of supporting of Eastern Indonesia development region, it is connected with Surabaya, not with Ujung Pandang or Manado, bot in Sulawesi.

An accordance with its natral condition, development in the Province of Molucca ought to be always begun from the sea. And in that relation, transportaion sector is very dominating, because 90% of Molucca area is sea and the remaining 10% the land. Although only 10%, the land area totals 85,000 Km2, whole its sea area totals about 700,000 Km2.

The greater number of Molucca villages lie on the beach; only a very few on mountanious area. So wherevere we go, we just will find sea. That is why people will say that the Province of Molucca is dominated by sea. It means that the people really live and life is mostly influenced and covered by sea. Various sea products area obtained, such as fish. When the sea ebbs, though there is no fish, shells emerge, which is also as foodstuff.

To face the future challenges, the think-tank leaders of this region evaluate Molucca needs expanding, and maritime knowledge and technology as a foundation. The world's technology today already provides everything.

"A nation having no technology knowledge, it will become superpower. Technology can be masterd only gaining a science and nobody will be able

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa datang pemikir dan tokoh dari daerah ini menilai, bagi Maluku dibutuhkan pengembangan dan pengetahuan serta teknologi maritim sebagai basis. Apa lagi teknologi dunia saat ini telah menyiapkan segalanya.

"Bagi negara yang tidak menguasai teknologi, mungkin akan terbelakang. Negara yang menguasai teknologi, akan masuk negara "Super Power". Teknologi dikuasai hanya dengan menguasai suatu ilmu, dan orang tidak akan menguasai teknologi tanpa ilmu. Sedangkan ilmu dikuasai karena pendidikan", ujar Akip.

4. Perlu Pemerataan Guru

Jumlah Sekolah Dasar di Maluku dewasa ini sebanyak 2.300 buah. Padahal jumlah desanya saja hanya ± 1.700 desa. Diambil perbandingan rata-rata dapat dikatakan hampir tiap desa memiliki dua buah SD. Untuk SMP di Propinsi Maluku pada akhir Pelita III, tiap Kecamatan ada 1 SMP. Jumlah Kecamatan di Propinsi Maluku ada 56 buah dan jumlah SMP sudah ada ± 156 buah.

Tapi bila dilihat dari segi geografis Maluku masih memerlujkan tambahan gedung sekolah mulai SD, SMP, dan SMA.

Sebab sekolah-sekolah yang ada sekarang masih memusat di beberapa pulau, sementara ada banyak pulau yang belum memiliki sekolah. Umumnya mereka sekolah naik perahu. Tentu ini menghambat proses belajar efisien. Misalnya satu SMP untuk satu Kecamatan, ini memungkinkan apabila sekolah tersebut berada dalam satu daratan, dan ditambah dengan sarana perhubungan yang lancar. Tapi kalau satu Kecamatan berada berlainan pulau, mana mungkin satu SMP untuk satu Kecamatan.

Menyangkut pemerataan guru Maluku menghadapi banyak masalah. Untuk menjangkau desa-desa pelosok kemampuan masih sangat terbatas. Ada satu sekolah dengan 6 guru, tapi ada sekolah hanya dengan 3 guru saja.

5. Lebih Mapan

Bicara tentang mekanisme Pemerintahan di Maluku sampai saat ini tentu sudah dapat dikatakan lebih mapan kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini adalah merupakan kenyataan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di Propinsi Maluku. Tapi itu tidak berarti Maluku sudah sampai pada tujuan yang sebenarnya. Masih banyak tantangan yang segera dihadapi dibalik itu harapan yang dapat ditunggu. Ketua DPRD Tk I Propinsi Maluku, Latuconsina, SH menyatakan itu kepada penulis buku "Indonesia Membangun" di ruang kerjanya di Ambon.

Lebih jauh Ketua DPRD Tk I Maluku menjelaskan beberapa segi-segi historis mekanisme pemerintahan mulai Pelita I jaman Sumitro sebagai Gubernur, meningkat Sumeru dan sekarang Hassan Slamet.

Mengenai terjadi kontrol Dewan terhadap kebijaksanaan eksekutif seperti yang ditangani oleh komisi-komisi seperti kegiatan peninjauan-peninjauan ke daerah bawahan, dimana hasilnya diplenokan dan dirapatkan dengan eksekutif merupakan tindakan korektif yang banyak juga manfaatnya.

Setelah peninjauan di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh DPRD memanggil Instansi Pemerintahan yang bersangkutan untuk membicarakannya secara kritis. Begitulah, sehingga Latuconsina menilai mekanisme pemerintahan dalam pembangunan dewasa ini relatif berjalan konstitusional dan sudah mulai tertib.

"Hasil pembangunan sekarang, kalau kita lihat secara nasional jelas bahwa keberhasilan pembangunan ini diakibatkan karena kita lebih tertib", katanya. Paling tidak menurut dia mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jauh lebih baik pelaksanaannya dibanding tahun-tahun pra Orde Baru.

Walaupun demikian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku ini menilai, masih banyak tugas-tugas pembangunan yang belum ditangani secara tepat. Terutama dalam mengatasi masalah-masalah pokok daerah seperti diutarakan Akip sebelumnya.

Misalnya dalam hal pembangunan perhubungan, Latuconsina melihat masalah perhubungan memang sebagai masalah yang sangat prinsip bagi Maluku. Karena Maluku sebagai suatu daerah maritim maka orang cenderung sering melihat kalau perhubungan laut yang perlu diatasi terlebih dahulu.

"Itu ada benarnya, tapi dari segi tahapannya Maluku harus membangun dulu sarana perhubungan darat", katanya. Alasannya begini. Maluku pernah mempunyai dua maskapai pelayaran lokal, dua-duanya hancur, hancur karena apa, karena mereka diwajibkan melayari trayek lokal. Akibatnya mereka tidak mampu menutupi biaya eksploitasi, muatan tidak ada di daerah. Mengatasi hal semacam itu menurut dia, Maluku perlu memikirkan adanya pelabuhan akumulasi. Pelabuhan yang mampu menampung hasil-hasil setempat sehingga kalau kapal itu datang memuat barang itu mampu menutupi biaya ekspoitasi yaitu

to develop technology without science, while science can be obtained by education", said Akip.

Equal Distribution of Teachers.

Primary Schools in this Province total 2,300 whereas the total number of villages are only ± 1,700. In proportional comparison, 1 village possesses 2 Primary Schools. For Yunior High School in the end of Pelita III, every subdistrict already possessed 1 Yunior High School. The total number of sub-district in the province area 56, while the total number of Yunior High School are 156 schools.

However, seen from geographical side, Molucca still needs eidditional school buildings for Primary School, Yunior High School and Senior High School, because the existing schools just center in several island, where many other islands possess no school. Generally the people go to school by cance. Surely this condition is ad obstacle to efficient study. For instance about 1 Yunior High School in 1 sub-district. This will be possible if the school exists in a land area to be added with smooth transport facility. But when the sub-district capital exists in other island, it is impractical to construct 1 Yunior High School for 1 sus-district.

In case of teachers equal distribution, Molucca faces so many problems. To reach remote villages, the possibility is still in limited condition. There are schools with 6 teachers, but there are also others with only 3 teachers.

5. More Affirm

Speaking about governmental mechanism in Molucca, now can be said more stable condition, to compare with the condition in the preceding years. This condition is real fact, can be felt by the whole people in the Province of Molucca. But that will not mean that Moluccans already reach its destination in real life. There are so many challenges soon to be faced, but beside it so many hopes are awaiting. Speaker of the Regional Parliament (Ketua DPRD Tingkat I) of the Province of Molucca said this "Indonesia Membangun" in his office in Ambon.

The speaker, Lotuconsina SH, explained further several historic's sides about governmental mechanism since Pelita I in the area of Sumitro as governor, to Sumeru and now Hasan Slamet.

The legislative control towards executive's policies as taking place under legislative body's commissions such as survey to lower level activities where the result were carried on to the meeting, and then to be confered with the executive produced many advantageous corrective actions.

After field survey with so many facts found, DPRD the Regional Parliement – called for the involved government institution to discuss them critically. So it happened, making the Speaker convinced that governmental mechanism in this development era today is already running constitutionally and in orderly manner.

"About the result of development today,seen from national view, it can be concluded that the result is gained because of more orderly condition", he said. At least according to him, planning mechanism and development realization are already in higher improvement to compare with the preceding years of the pre-New-Order period.

Though already in such achievement, the Speaker of the Regional Parliament of the Province of Molucca evaluated that a lot of development duties are yet to be taken in a right way, especially to overcome the regional basic problems such as mentioned by Akip before.

For example, in case of transportation development, Latukonsina believe transportation problems as very basic problems for Molucca. Because Molucca is and archipelago, everyone tended to see that sea transportaion problems ought to be solved first.

"That is righ. In case of priority, Molucca ought to develop first its land road facility" he said. His reason was : Once Molucca had 2 local shipping lines. Both were grounded, because they were ordered to serve local lines. Both were grounded, because they were ordered to serve local lines. The effect was, they were unable to meet operational cost. There were no car go in the lines. To solve such problems, Molucca demanded the existence of accumulation harbours. Seaports which are able to gather products so whenever a ship comes, the cargo are available. It will mean an income for that ship, to pay the operational cost".

"How to create an accumulation harbour?", or how to construct sufficient harbours?. It must be in relation with its hinterland. And it first problem is land transportation facility construction. So to solve transportaion problems in Moluccas, eventhough the area is a maritime area, development ought to give priority to land transportation construction".

Latukonsina also sees the need for conformity between natural resources and manpower resources in quantitaty. Area of the region not in proportion with the number of souls, how can it be solved? Besides such inconformity, there is also a crowded concentration of people in small islands while in bigger islands the occupation is rare. To solve such a problem, transmigration pro-

biaya-biaya yang dikeluarkan."

"Bagaimana menciptakan pelabuhan akumulasi? Atau bagaimana membangun pelabuhan-pelabuhan yang cukup? Itu harus ada hubungan antara pelabuhan atau interland (belakang). Dan itu masalah bagaimana perhubungan darat dahulu. Jadi mengatasi masalah perhubungan di Maluku walaupun daerahnya maritim tapi yang perlu sesungguhnya pembenahan daerah daratnya".

Lebih jauh Latuconsina juga melihat bentuk keseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara kuantitatif. Luas daerah tidak sebanding dengan jumlah jiwa, bagaimana cara mengatasinya dan disamping ketidakseimbangan terdapat konsentrasi penduduk yang padat di pulau-pulau kecil sementara di pulau-pulau besar penduduknya jarang. Mengatasi hal tersebut program transmigrasi disebut sebagai jalan keluar bagi Propinsi ini.

Hal ini penting mengingat sumber daya alam yang cukup besar, tetapi sumber daya manusia secara kuantitatif pendidikan belum menunjang. Dalam APBD terlihat bahwa biaya untuk pemindahan penduduk sekitar 1 milyar setiap tahun. Mengenai pola tanaman perdagangan yang cocok seperti monokultur, perlu terus ditingkatkan dan memerlukan diversifikasi, sebab Maluku selama ini orientasi ekspornya hanya satu dua jenis. Bila terjadi fluktuasi harga di pasaran maka daerah ini berada dalam posisi yang sulit. Kalau sebelumnya Maluku hanya dikenal penghasil kopra dan cengkeh, maka belakangan ini Maluku sudah mulai memperkenalkan coklat, kopi, kelapa sawit, karet disamping penggalakkan hasil-hasil laut.

6. *Membangun Kota Ambon*

Menyinggung masalah mekanisme pemerintahan pembangunan kota Ambon sebagai ibukota Propinsi Maluku sangat terkait dengan upaya pemerintah alam mengembangkan mekanisme pemerintahan di tingkat Propinsi sampai ke desa. Walikotamadya Ambon, **J Dicky Watimena** dalam wawancara dengan penulis mengatakan, pengembangan kota Ambon sebagai kota pusat pemerintahan seperti disebut Latuconsina. Namun Dicky Watimena melihat adanya kerja keras pemerintah dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan keinginan tentang pembangunan kota Ambon merupakan tuntutan daripada mekanisme pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kota ambon merupakan ibukota Propinsi Maluku sekaligus adalah merupakan miniatur dari Propinsi Maluku secara keseluruhan, sehingga ambisi Dicky selaku Walikota ialah selalu berusaha untuk meningkatkan kota Ambon sehingga siapapun yang datang di kota Ambon dapat membayangkan Maluku secara keseluruhan. Melalui kota Ambon diharapkan orang dapat melihat Maluku secara keseluruhan. Melalui suatu perencanaan yang matang, seluruh potensi yang dimiliki Maluku dari segi kebudayaan dan adat istiadatnya maupun peninggalan-peninggalan kebudayaan seperti bekas kerajaan-kerajaan, nantinya akan digarap secara bertahap bagi Ambon. Dan ini pula merupakan perkembangan dalam persiapan kota Ambon sebagai pusat pariwisata yang sebagaimana juga orang tertarik untuk dapat berkunjung kekota lainnya, misalnya Tual di Maluku Tenggara, Banda, tetapi cukup di Ambon saja untuk melihatnya.

Sebagai kota pendidikan, masalah lingkungan pendidikan akan dipusatkan di kota Ambon. Sekarang sudah ada 4 pendidikan Tinggi di kota Ambon yaitu Universitas Pattimura, Universitas Kristen Maluku, Universitas Darussalam, dan IAIN.

Kemudian Ambon sebagai ibukota Propinsi harus mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Maluku yang memiliki potensi wisata laut membutuhkan berbagai fasilitas pelayanan yang bersifat **"khas"**, apalagi kalau dikaitkan dengan ambisi Maluku sebagai **"Hawaii"-nya Indonesia.**

Demi mencapai wujud Ambon sebagai pusat-pusat kegiatan di Maluku, Kotamadya Ambon sudah menyiapkan suatu Pola Dasar yang luasnya ± 377 Km persegi menjadi 7 pusat pengembangan.

a). Kota Ambon Lama yang luasnya 4 Km persegi sebagai pusat Pemerintahan dan Pemukiman akan dibenahi supaya tertib.

b). Poka diarahkan sebagai daerah pengembangan pendidikan Tinggi. Semua kampus-kampus akan dipusatkan di sini.

c). Desa Laha diarahkan sebagai Pusat Pengembangan perhubungan udara ditambah dengan kawaan pertambangan golongan C (pasir, batu kerikil dan lain-lain).

d). Desa Passo diarahkan sebagai pusat pemukiman dan perumahan.

e). Desa Kutumurri diarahkan sebagai pusat peternakan/pertanian dan sebagian kecil untuk pariwisata.

f). Desa Naku dan Kilang diarahkan sebagai pusat peternakan/pertanian. Daerah ini merupakan penghasil buah-buahan untuk suplay ke kotamadya Ambon.

g). Desa Latuhalat dikembangkan sebagai pusat pariwisata/industri Batu bata dan pengolahan minyak bahan kosmetika.

gramme is a way otu for this province.

Thise case is important to remember : abundant natural resources, but the human power factor is not yet supporting. In APBD (Regional Budget) in can be seen that the cost for people's resettlement is about Rp 1 billion every year.

About trade crops design, the monoculture needs to be improved and diversified, because until today, export orientation of Moluccas includes only in 1 or 2 kinds of commodities. If there is a price fluctuation in the market, this region will face a difficult situation. While in the past Moluccas was known as copra and clove producers, nowadays Molucca begins to introduce chocolate, coffee, palm oil, rubber beside promotion of see-products.

To Develop Ambon Municipality

Speaking about the mechanism of government in Ambon Municipality development as the provincial capital, it very closely related with the efforts of the government to improve its governmental mechanism in the provincial level down to the villages. The Mayor of Ambon Municipality J Dicky Watimena in an interview "Indonesia Membangun" related the improvement of Ambon city as a central governmental activity as mentioned by Latukonsina. Yet Dicky Watimena mainly saw about an existence of hard work and participation role of the people to realize the expectation of Ambon Municipality development, as the clean and respectable governmental mechanism.

Ambon city is Capital the Province of Molucca as well as a miniature of the whole province. Dicky's ambition as a Mayor is to try to improve Ambon City condition where whoeve enters the city can see the image of the whole province condition. It is expected that through Ambon everybody can see the whole Molucca. A mature plan will realize all Molucca potential in cultural side, tradition and customs, historical relics such as former sultanates, will be reformed in Ambon. This will become an improvement to prepare Ambon as a centre of tourism, where for instance if there is a tourist desiring to see other cities in the province, such as Tual in South East Molucca or Banda city, they just come to Ambon and fulfil the desire.

As and education centre, the problem of educational environment will be concentrated in Ambon. Until today already exist 4 higher learnings exist in Ambon city, i.e. University of Pattimura, University of Christian Molucca, University of Darussalam, and Institute for Islam Religion (State).

Ambon as a capital of the province, ought to be able to fulfill the need of tourism industry. Molucca which possess sea tourism potentials demands special character service facilities, moreover to be linked with Molucca ambition to become Indonesian "Hawaii".

For the purpose to realize Ambon as Molucca's centre of activity, Ambon Municipality already prepares a Master Plan for about 377 Km2 to become 7 centres of expansiaon :

1. Old Ambon with an area of 4 Km2 as a centre of government and inhabitation will be rearranged to be more in order.
2. Pola will be directed to become the centre of Higher Learning institutions. All campuses will be concentrated here.
3. Hala village will be directed to become the centre of air transport development to be added with area of group mining activities (sand, stone etc).
4. Passo village will be directed for housing and inhabitation centres.
5. Kutumurri will be directed to become a centre of cattle breeding and agriculture, and littele part in tourism.
6. Naku and Tiram villages will be developed as centre of cattle breeding and agricultural activities. This are is the Municipality of Ambon supplier of fruits.
7. Latunalat village to become a centre of tourism and bricks production, with cosmetic material derived from oil production.

Ambon has been prepared also to become an industrial city of fishery products, in view of Molucca water area possessing a great variety of fishery products. For this purpose, the administration of the province agrees will collect the whole fishery prducts coming from regions of the province for export purpose and local consumption.

Activities in export production and local consumption in this region were only using small motors. Moluccans are fish-eating people. Where in national level the consumption rate is 14 Kg/person/year, but in Ambon already about 50 Kg/person/year.

In case of trade and services, in these running years, improvement appears in Ambon city, for example in transportation, contractors, capital investment and so on. This is an achievement to compare with the condition in years before, where the mentioned sectors were still in slow rate activities. In the years before people prefered government office work rather than private's sector.

An instance relates the plant to construct the trading centre of MARDHIKA with investors coming from this region themselves. The centre's construction will be in value of Rp16 billion. In future prospect, the centre will become a shopping centre, able to gather all the province's demands

Ambon juga dipersiapkan sebagai kota industri pengolahan ikan mengingat perairan laut Maluku memiliki potensi besar dalam produksi ikan, untuk itu Pemda Tingkat I Maluku menyetujui pembangunan dua cold storing di Ambon. Tempat ini menampung semua ikan yang didatangkan dari daerah-daerah untuk diekspor dan untuk konsumsi lokal.

Kegiatan dalam menampung ikan untuk diekspor, dan untuk makan setiap hari di daerah sini dengan motor-motor kecil saja. Perlu diketahui, masyarakat Maluku, adalah masyarakat pemakan ikan. Di tingkat Nasional 14 kg per orang/tahun, tapi di Ambon ± 50 kg per orang/ tahun.

Dalam hal perdagangan dan jasa beberapa tahun terakhir ini kota Ambon juga mengalami perkembangan misalnya dalam hal angkutan, kontraktor, penanaman modal. Hal ini merupakan suatu kemajuan sebab beberapa tahun yang lampau bidang ini kurang begitu berkembang di daerah ini. Menurut dia masyarakat Ambon sebelumnya lebih tertarik menjadi pegawai negeri daripada usaha swasta.

Sebagai satu contoh dia menyebutkan rencana pembangunan pusat perdagangan MARDHIKA dengan investor yang berasal dari putra daerah sendiri. Pusat perdagangan ini dibangun dengan biaya Rp 16 milyar. Kelak diharapkan dapat menjadi pusat pertokoan yang mampu menampung kebutuhan seluruh Maluku dan masyarakat daerah ini tidak perlu lagi harus pergi ke Ujungpandang, Surabaya atau Manado.

7. Investasi dan Kerja Keras Mendesak.

Penanaman modal di Maluku ini sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan baik sebab upaya untuk lebih menyederhanakan sistem penanaman modal sudah dapat ditempuh melalui sistem satu atap dengan mengutamakan pola kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait di dalamnya. Sehingga tidak lagi menjadi alasan kesulitan dan hambatan secara struktural dalam sistem penanaman modal.

Semuanya terbuka, siapapun yang berminat akan kita layani dengan baik. Demikian penegasan Ketua BKPMD Tingkat I, Propinsi Maluku P. Kailola, SH. Yang pokok adalah bahwa bagaimana pengusaha yang bermodal besar, menengah dan kecil dapat dan mau menanam modalnya di Maluku.

Belakangan memang terdapat trend yang menarik dari usaha para investor untuk datang ke Maluku. Pada saat ini PMDN ada 50 buah dan PMA ada 5 buah. Rata-rata nilai investor cukup besar yaitu Rp 310 milyar, dan PMA US $ 125 juta. Total seluruhnya melebihi Rp 500 milyar. Untuk tahap Pelita IV Maluku meningkatkan investasi sekitar Rp 600 milyar.

"Dengan kecenderungan yang menaik tadi maka target Rp 600 milyar itu mungkin dapat tercapai" kata **Kailo.**

Kemudian sehubungan dengan kecenderungan naiknya usaha penanaman modal. Kepala Kanwil Perindustrian Maluku, F.J Tutuhatunewa menyebutkan, perlu diimbangi dengan kerja keras. Ia mengatakan, memang sudah sewajarnya kerja keras dari seluruh masyarakat diperlukan dalam setiap kegiatan pembangunan terutama di sektor penanaman modal atau di sektor industri. Namun yang sangat mendesak dipikirkan menurut dia adalah keterpaduan dalam menanganinya sehingga kerja keras yang dikeluarkan dan modal yang dipertaruhkan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan sekaligus dapat menambah devisa negara untuk keperluan pembangunan. Keterpaduan disini adalah pencapaian hasil akhir dimana secara keseluruhan betul-betul menguntungkan berbagai pihak.

Dilihat dari sektor Industri di Propinsi Maluku, sampai pada Pelita IV masih mengalami perkembangan yang turun naik. Hal ini tentunya tidak lepas dari sistem perekonomian dunia atau pasaran dunia akan hasil-hasil komoditi yang laku dipasaran internasional. Yang jelas masih banyak yang perlu mendapat perhatian sehingga hasil komoditi yang dihasilkan daerah sesuai dengan potensinya dapat lebih menguntungkan daerah ini di masa-masa mendatang. Sehingga gairah masyarakat untuk lebih mengembangkan komoditi ekspor dapat dikembangkan melalui usaha industri pertanian dan industri hasil-hasil kehutanan dan hasil kekayaan laut.

Tutuhatunewa justru menilai potensi daerah Maluku ini memang masih sangat kecil yang dapat dimanfaatkan, khususnya sumber daya alam karena data sumber daya alam mineral di Propinsi Maluku sampai saat ini belum lengkap sedangkan upaya di sektor pertanian dan perikanan sangat tinggi sekali.

Kita mengetahui Maluku 90% wilayahnya terdiri dari lautan sedangkan daratannya 10%. Namun demikian dari daratan ini potensinya tidak kecil, seperti kayu, rotan dan damar.

Tutuhatunewa menyebut kegiatan promosi merupakan tuntutan bagi usaha pemanfaatan potensi daerah ini. Dia menyebutkan beberapa hal yang perlu dipikirkan mengenai hal tersebut misalnya dalam usaha memperbaiki struktur industri antar industri besar, sedang dan kecil

and the people in this city need no longer go to Ujungpandang in Sulawesi Surabaya and Manado for shopping.

7. Investment and Hard Work Stressed

Investment in Molucca can actually be realized in better condition, because endeavors to simplify of the investment procedure have already been taken, by one-roof coordination design system, among government office related to it, so that no more reason exists about difficulties and hindrance in structural condition of the investment system.

"Everything open, whoever is interested will be given a better service" will be given a better service".So stressed the Chief of BKPMD-Investment Coordination Body of the Province of Molucca, Kailola SH. The point is how to make the bigger middle and smaller investors willing to invest their capital in Molucca.

Nowadays thre exist an increasing trend in the investors efforts to come to Molucca. Today PMDN-Capital Investment by Domestic Investors, totals 30, and PMA-Foreign Investment-totals 5. The value of investment amount is big enough, i.e. domestic Rp 310 billion and foreign investment about US $ 125 million. The total number as a whole becomes more than Rp 500 billion. For the phase of Pelita IV, Molucca wants to increase it to Rp 600 billion. Under such and increasing trend, it can be hoped that the Rp 600 billion of investment will be reached, said Kailola.

Then in relation to the increasing tendency of capital investment, the Chief of the Regional Office of Industry Department of Molucca, F J Tutuhatunewa, mentioned about the need of hard-work. He said that it is a musth for the whole people to work hard in every development sector especially inthe capital investment sector in the industrial sector. Yet the mosth demanding need, according to him, is the unificiation in its handling, so that the hard work and the capital invested can benefit the people as well as increase the State's revenue. Here unificaion means the last result achievement beeing a benefit for the whole people.

Industrial sector in the Province of Molucca to the end of Pelita IV is still in and inconsttant improvement condition. This condition of course cannot be taken away from the economic condition of the world or the world marketing for the commodities. Obviously, a lot of things ought to be taken into consideration so that this province commodity products according to the potentials will be ina more profitable condition in the future. And people's interest through industrial endeavors in agriculture, forestry production an dmarine resources products.

Tutuhatunewa really evaluated that this region potential exploited thus far is still in small number for utilization, especially natural resources. Because natural resources data in this region still inadequate, endeavors in agriculture and fishery are very high.

We know that Molucca has 90% sea water area and 10% land. Though only in small percentage, the land possesses a great potential of timber, rattan, and resin.

Tutuhatunewa mentioned that promotion activity is needed for utilization endeavors of this region potentials. He mentioned about several thing which ough to be considered about that matter, for instance the effort to reform industrial structure between bigger, middle and smaller industries which al of them ought to be in mutual relation.

To expand industries in this city, machinery and electronics are required, particularly for the purpose of mining exploitation. For instance, Molucca is also in great potential of cement production. In North Seram and Buru island exist a great deposit.

Beside machinery industry, small industry is also important in relation to its absorbtion degree of work force, especially in people' handicrafts. Guidance of small industry in Molucca had been done by individual activities, and had been started since Pelita II and Pelita III. all of them had been handled by grouping centres according to the national policy. Nowadays there area 95 centres under guidance.

8. Vital Projects in Molucca have become the people's hope

From various challenges placed before the government and the people of Molucca since the beginning of development movement, endeavors have always been undertaken together with people's participation and support to the government in hard work to make a real success of development movement. Many development projects in the province already have been successful to increase the economic development of the people, and the people's living standard in various fields.

Following area several vital projects in Molucca :

a. Transportation

1. Road project of Tobelo-Kao as long as 79 Km, connecting national transmigration area in Kao with capital of Tobelo subdistrict, which is the centre of trade in Eastern Halmahera and will be in role to accelerate economic life or the people an government activity.

yang harus saling mengkait.

Kemudian industri yang perlu dikembangkan di daerah ini ialah ɔermesinan dan elektronika, terutama untuk kepentingan pengolahan ɔahan tambang, misalnya Maluku juga potensial dalam produksi semen.

Di Seram Utara dan P. Buru terdapat potensi yang cukup besar. ielain industri permesinan, industri kecilnya penting karena me- ɪyangkut banyak tenaga kerja yang terserap. Khusus untuk kerajinan akyat. Pembinaan industri kecil di Maluku ditangani secara perorangan an ini telah ditetapkan sejak Pelita I dan Pelita III. Semua ditangani ɪelalui sentra-sentra sesuai dengan kebijaksanaan nasional.

Sekarang ini di Maluku dibina ada sebanyak 95 buah sentra dan ampai akhir Pelita III seluruhnya 103 buah.

Proyek-proyek vital di Maluku telah menjadi tumpuan harapan masyarakat.

Dari berbagai tantangan yang dihadapkan kepada Pemerintah dan ɪasyarakat Maluku sejak dicanangkan gerak pembangunan, senan- asa telah berupaya, disertai dengan peran serta masyarakat untuk ut bekerja keras menyukseskan pembangunan secara nyata, harapan rsebut sudah diambang pintu sebab berbagai macam proyek di Pro- nsi Maluku mulai Pelita I sampai Pelita IV sekarang ini telah mam- ɹ meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kehidupan asyarakat diberbagai bidang.

Berikut ini ditampilkan beberapa proyek vital di Maluku.

Perhubungan

Proyek jalan Tobelo-Kao sepanjang 79 Km, yang menghubungkan daerah transmigrasi Nasional di Kao, dengan ibukota Kecamatan Tobelo yang merupakan pusat perdagangan untuk Halmahera bagian Timur serta melancarkan perekonomian masyarakat dan pemerintahan.

Jalan Payahe-Weda sepanjang 28 Km, untuk memudahkan hubungan antara Pulau Halmahera bagian Timur yang sangat ber- potensi dengan ibukota Kabupaten Dati II Maluku Utara (Ternate). Kegunaan jalan ini selain untuk melancarkan arus perekonomian masyarakat juga menghindari kesulitan-kesulitan pelayanan antara Pulau Halmahera bagian Timur dengan ibukota Dati II Maluku Utara (Ternate).

Jalan Amahi—Saleman sepanjang 75 Km, yang menghubungkan Pulau Seram Bagian Selatan serta daerah transmigrasi Nasional di daratan Pasahari ibukota Kabupaten Dati II Maluku Tengah (Masohi). Dengan ad a ini, maka baik perekonomian, pemerin- tahan menjadi lancar dan cepat terutama arus penyaluran produksi masyarakat transmigrasi di dataran Pasahari.

Jalan Ambon—Laha sepanjang 35 Km yang menghubungkan pusat kota dengan lapangan terbang Pattimura yang merupakan jalan sangat penting, terutama hubungan jalan lalu lintas udara.

Jalan Saumlaki-Arma sepanjang 155 Km, selain sebagai kelancaran perhubungan di pulau Yamdena, juga membuka isolasi masyarakat pedesaan di daerah ini dalam hubungannya dengan ibukota Dati II Maluku Tenggara (Tual) dan ibukota Propinsi Maluku (Ambon). Daerah-daerah yang dilalui jalan ini sangat berpotensi dan oleh Pemerintah Daerah Maluku direncanakan sebagai Pusat Lumbung Pangan untuk mensupply masyarakat di ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dan sekitarnya yang merupakan daerah kritis.

Jalan jurusan Namlea—Mako sepanjang 60 Km, di Pulau Buru. Jalan ini menghubungkan pemukiman transmigrasi dengan Namlea sebagai ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pemerin- tahan dan pusat pemasaran hasil-hasil produksi transmigrasi.

. Jalan ring road Jailolo—Kedi—Galela. Jalan ini mempunyai fungsi memperlancar dan memperpendek hubungan di Halmahera bagian Utara antara sebelah Timur dengan sebelah Barat.

. Jalan jurusan Teheru—Werinama—Geser—Bula—Wahai. Jalan ini apabila sudah berfungsi, maka hubungan antara Kecamatan- kecamatan yang terletak di Pulau Seram sebelah Timur akan ber- tambah lancar dan menunjang produksi pada daerah-daerah tersebut.

'. Dermaga Tobelo, dermaga tersebut sangat penting karena Tobelo merupakan pusat perekonomian terbesar di Pulau Halmahera bagian Timur antara lain kopra terbesar di Kabupaten Maluku Utara.

). Dermaga Tehoru dan dermaga Piru selain sebagai pusat perhubungan pada kecamatannya. Juga sebagai pusat perhubungan dengan ibukota Propinsi.

1. Lapangan terbang Pattimura Ambon adalah pusat perkembangan lalu lintas udara antara ibukota Propinsi dengan daerah-daerah dalam, maupun luar Propinsi Maluku.

.2. Lapangan terbang Ternate selain sebagai pusat perkembangan udara pada Kabupeten Dati II Maluku Utara, dengan ibukota Propinsi juga dengan daerah luar Propinsi Manado (Sulawesi Utara).

2. *Road project of Pahaya-Neda as long as 28 Km, to make better transpor- tation condition between Eastern Halmahera with its great economic poten- tial with Ternate, the capital of North Molucca District. Beside economic potential, the road also function to increase governmental services of Northern Molucca District administration.*
3. *Road project of Amahi-Saleman is 75 Km length, connecting Southern part of Seram with national transmigration area of Pasahari, and Masohi the capital of Central Molucca District. With this road, economic and government activity will become faster, especially the supply flow of transmigration production in Pasahari land.*
4. *Road of Ambon-Laha, 35 Km in length, connecting the city with Patti- mura Airport, is a very important road to support air transportation.*
5. *Road of Saumlaki-Arma, a length of 155 Km, beside for smooth flow of transportation in Yamdena island, also to open the eisolated condi- tion of village communicaties in this area, connecting their places with Tual, the capital of Southeast Molucca and Ambon, the capital of the province. Regions passed by this road are very rich in mineral deposits, which by the regional administration of Molucca Province are planned to become a centre of food accumulation area, to supply the capital city of South East Molucca and its surroundings which are critical areas.*
6. *Road of Namlea-Mako, a length of 60 Km in Buru island. This road connects transmigration area with Namlea the capital city of subdistrict, which functions as the centre or government administration and the cen- tre of marketing for transmigrants' products.*
7. *Ringroad of Jailolo-Kedi-Galela. To speed and shortcut transportation length in Northern Halmahera between eastern part and wester part.*
8. *Road of Tuheru-Werinama-Leser-Bula-Wahai. If already in function, transportation between sub-districts in the eastern part of Seram island will be smoother, supporting production in those regions.*
9. *Pier of Tobelo, very important because of Tobelo is the greatest economic centre in eastern Halmahera island, among others as the greatest copra producer i Noerth Molucca District.*
10. *Pier of Tehoru and Pier of Piru, beside as centre of transportation for sub-district, also as centre of transportation with the capital of the pro- vince.*
11. *Pattimura Airport as centre of air traffic development between the capital city of the province with internal areas, as well as with outer destination.*
12. *Ternate Aiport as centre of air traffic in North Molucca with the capital of the province and also with Manado in Sulawesi.*
13. *Kao Airport, to enhance air transportation in Central Halmahera, especially in national transmigration area, to connect with the capital or North Molucca District and with the capital of the Province of Molucca.*
14. *The Airport of Kisar, beside to make easier transportation between that region with the capital of Southeast Molucca District, also with the capital of the Province of Molucca. As known, Kisar region is difficult to reach by because the length or time needed.*

b. Telecommunication

Relay station of TVRI of Tual is very important to serve the people in the area of Southern part of Southeast Molucca, which is far remoted from the capital of the Southeast Molucca District.

c. Tourism

1. The centre of Tourism of Marina is one of the tourism destinations having a great potential. It exists in the natural reservation of Pombo island.

2. Banda Neira island is a tourism destination with special character of Marine Park which becomes an equatorial emerald and is a centre of Marine Tourism and Ancient Time culture.

d. Transmgiration and Resettlement

1. Transmigration areas in the land of Pasahari, Seram island, and Kao land and Wasilo in Halmahera island are very important beside for popula- tion equal distribution for the greater islands with rare population, also for an improvement of work force. On the other side there are still large land areas provided, need to be opened and utilized to increase the regional economic value.

2. Farming production improvement projects. Trade commodity plants until today still hold an important role in the economic life of Molucca region and is a main source of income for the greater part of the people, because ownership and production are mostly held by the people. This kind of design really guarantees the aspect or equity.

Endeavours ought to be improved to increase the prduction of farming through Farming Production Improvement Projects, Rehabilitation Project of Export Commodity Plantation (PRPTE), People's Coconut Expansion Project (SCDP) or NES VI Project.

3. Molucca Electricity Project.

Electricity demands in the northern of Molucca in the first instance is for people's consumption and secondly to increase interest in industrial sec-

13. Lapangan terbang Kao, untuk melancarkan hubungan lalu lintas udara di daerah Halmahera Tengah, terutama daerah transmigrasi nasional dengan ibukota Dati II Maluku Utara, serta ibukota Propinsi Maluku.
14. Pelabuhan Udara Kisar, selain mempermudah hubungan antara daerah tersebut dengan ibukota Kabupaten Dati II Maluku Tenggara, dan juga dengan ibukota Propinsi Maluku. Sebagai diketahui daerah Kisar merupakan Kecamatan yang sangat sukar dilalui dengan perhubungan laut, selain keadaan alamnya juga memakan waktu yang cukup lama.

b. T e l e k o m u n i k a s i

Stasiun Relay TVRI Tual sangat perlu untuk melayani masyarakat di daerah Kabupaten Dati II Maluku Tenggara bagian Selatan yang jauh terpencil dari ibukota Dati II Maluku Tenggara.

c. P a r i w i s a t a

1. Pusat Wisata Marina Wainuru sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang sangat berpotensi, yang berada dalam satu paket dengan Cagar Alam Pulau Pombo.
2. Daerah tujuan wisata Pulau Banda Neira dengan ciri khas Taman Lautnya yang merupakan zamrud khatulistiwa dan sebagai suatu pusat Wisata Bahari & Budaya Kepurbakalaan.

d. Transmigrasi & Resettlement

1. Transmigrasi di dataran Pasahari Pulau Seram serta dataran Kao dan Wasilo di Pulau Halmahera adalah sangat penting selain sebagai pemerataan penduduk pada pulau-pulau besar yang masih kurang penduduknya, juga sebagai peningkatan Tenaga Kerja. Dilain pihak masih terdapat tanah-tanah pertanian yang luas yang perlu dibuka dan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
2. Proyek-Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan di Maluku. Tanaman Perdagangan hingga saat ini masih memegang peranan penting dalam perekonomian daerah Maluku dan merupakan sumber utama pendapatan sebagian besar rakyat, karena pemilihan dan pengusahaannya sebagian besar berada ditangan rakyat. Pola demikian sangat menjamin aspek pemerataan.
   Oleh sebab itu usaha-usaha peningkatan produksi perkebunan melalui Proyek Peningkatan Produksi Perkebunan, Proyek Rehabilitasi, Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE), Proyek Pengembangan Kelapa Rakyat (SCDP) maupun Proyek NES VI, perlu lebih ditingkatkan.

tor. In fact there is an increasing demand in this sector day-by-day. Because of it, electricity project of Molucca ought to be improved, to reach the whole area of this province of thousand islands, especially in the programme of rural electrification.

4. Forest resources in Molucca area available to supply materials for 12 plywood manufacturers, where 10 are already under operation. The existence of these plywood industries, beside to increase regional income is also for the state's revenue.

5. Several islands in Molucca possess a high density of population, while the greater islands such as Halmahera, Buru, Seram adn Yamdena suffer a lower density rate, although posessing high economic potential. To solve such a problem, programmes have been planned to resettle people from high density population to the lower degree population,in from of opening of new area for the sake of regional economic improvement.

6. In the scheme to improve the quality and capability of work force, Hall of work Training (BLK) have been constructed in Ambon, Masohi and Ternate, which area already good function.

3. Proyek Perlistrikan Maluku
   Kebutuhan perlistrikan di Maluku bagian Utara adalah untuk konsumsi masyarakat disamping untuk menggairahkan investasi di sektor industri, ternyata permintaan kebutuhan listrik makin hari makin meningkat.
   Oleh karena itu proyek perlistrikan Maluku perlu lebih ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh wilayah daerah seribu pulau ini, terutama dalam rangka Listrik Masuk Desa.
4. Hutan Propinsi di Maluku telah dapat menjamin berdirinya 12 buah pabrik plywood diantaranya 10 buah telah beroperasi. Dengan adanya pabrik plywood ini tentunya disamping memberikan pendapatan bagi daerah, sudah memberikan devisa bagi Negara.
5. Beberapa pulau di Maluku mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi pada beberapa pulau yang digolongkan besar seperti Halmahera, Buru, Seram dan Yamdena mengalami kejarangan penduduk dan memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi.
   Dalam memecahkan masalah ini, maka diprogramkan pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah kosong dalam rangka membuka daerah-daerah baru untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas tenaga kerja telah dibangun Balai Latihan Kerja di Ambon, Masohi dan Ternate yang telah berfungsi secara baik.

PERKEMBANGAN BUMD dan PERUSAHAAN SWASTA di MALUKU





BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Raya Pattimura No. 7 Amboina 97124

I. U M U M

Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagai suatu Perusahaan Daerah didirikan pada tanggal 25 Oktober 1961.
Dalam masa pertumbuhannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka pendirian BPD Maluku ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1/DPRGR/ dengan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 1/DPRDGR/ 1966. Pendirian BPD Maluku seperti yang digariskan dalam Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tersebut, yaitu bermaksud menyediakan rangka pembangunan nasional.

Modal dasar pada saat didirikan yang ditentukan menurut Perda tersebut di atas adalah berjumlah Rp 360 juta. Sampai akhir tahun 1972 BPD Maluku memiliki modal disetor sebesar Rp 23.600 (penciutan dari Rp 23.600.000 uang lama) dan cadangan yang dimiliki BPD Maluku pada akhir tahun 1972 hanya berjumlah Rp 153.000,-.

Pada perkembangan selanjutnya, atas petunjuk Direksi Bank Indonesia maka telah dilakukan reorganisasi serta pengangkatan Badan Pengawas dan Direksi yang baru.
Namun langkah penting yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Maluku adalah meningkatkan modal dasar menjadi Rp 3 milyar yang diatur dalam Perda Nomor 05 Tahun 1980. Sementara itu dengan perkembangan yang dicapai saat ini, tengah dipersiapkan Rancangan Peraturan Daerah oleh Gubernur KDH Tkt. I Maluku untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 3 milyar menjadi Rp 15 milyar.

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, situasi perekonomian saat ini belum pulih dari dampak resesi yang berkepanjangan. Namun dengan kerja keras dari seluruh jajaran BPD Maluku maka ada nampak kemajuan/peningkatan yang cukup berarti antara lain ditunjukkan dengan laju kenaikan volume usaha dalam tahun 1984/1985 dan 1985/1986 rata-rata sebesar 8,51%. Secara garis besar selain kenaikan volume usaha, tinjauan dari segi kuantitatip juga menunjukkan bahwa peningkatan diperoleh dalam hal penghimpunan dana, baik yang bersumber dari dana sendiri maupun dana luar, masing-masing dengan laju kenaikan rata-rata sebesar 22,73% dan 8,99%.
Demikian pula dalam hal pinjaman yang diberikan maupun pemberian jaminan bank menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Berkenaan dengan upaya perluasan jangkauan operasional maka saat ini BPD Maluku sudah mempunyai 5 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah di Maluku yakni di Tual yang dibuka pada tahun 1967, di Namlea pada tahun 1980, di Sanana pada tahun 1982, di Saumlaki pada tahun 1983 dan Kantor Cabang di Ternate dibuka pada tahun 1985. Dalam tahun 1987 ini akan dibuka lagi 2 Kantor Cabang masing-masing di Tobelo Kabupaten Maluku Utara dan di Dobo Kabupaten Maluku Tenggara.

Berkenaan dengan bertambah luasnya jangkauan operasional maka dengan sendirinya personil yang mendukung operasional tersebut akan meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam hal kuantitas jumlah pegawai yang bertambah selain untuk mengimbangi volume kegiatan yang meningkat di Kantor Pusat,

juga untuk mengimbangi pengembangan dari Kantor-kantor Cabang yang sudah ada maupun rencana kantor cabang yang akan dibuka.

Selain peningkatan jumlah personil secara kuantitas, diusahakan untuk ditunjang juga oleh peningkatan kualitas pegawai berupa program pendidikan dan latihan melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai kursus/latihan.
Dalam tahun 1986 jumlah pegawai BPD Maluku yang telah mengikuti berbagai kursus maupun latihan di LPPI maupun pada lembaga lainnya sebanyak 17 orang dari berbagai tingkat pendidikan dan jenis pendidikan/latihan yang diikuti.

II. Kegiatan Operasional

Selain berfungsi sebagai Bank Pembangunan dan pemegang Kas Daerah, BPD Maluku juga berfungsi sebagai Bank Umum.
Berkenaan dengan fungsi termaksud maka dalam kegiatan operasional BPD Maluku langsung berperan aktip tidak hanya dalam penghimpunan dana masyarakat, tapi juga dalam rangka penyaluran dana kepada masyarakat berupa pemberian kredit, kegiatan operasional yang menyangkut jasa bank umum lainnya yaitu transfer/pengiriman uang dan penerbitan jaminan bank.

1. Penghimpunan Dana

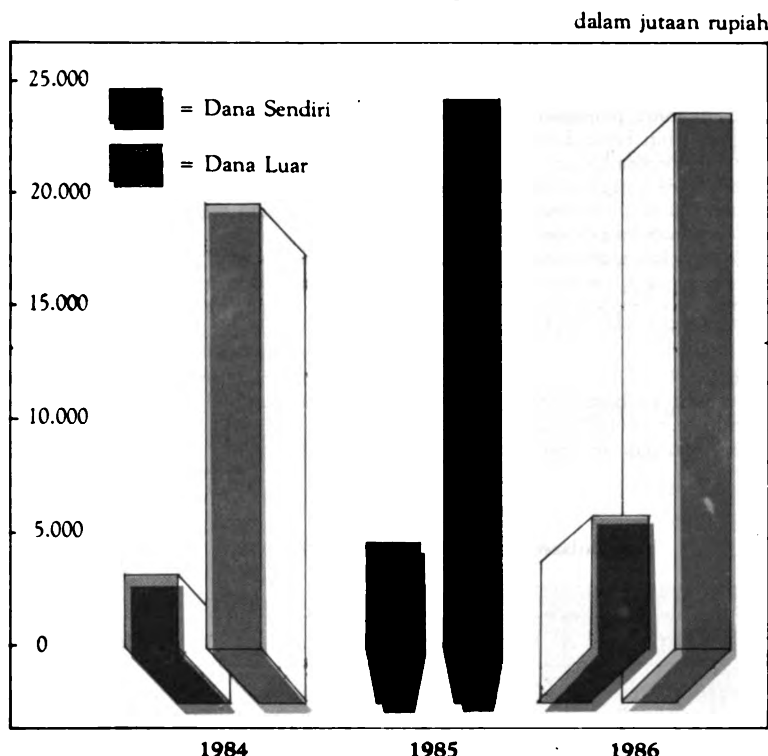
Dana yang terhimpun bersumber dari dana sendiri dan dana luar. Jumlah keseluruhan dana tersebut untuk periode 1984 - 1986 menunjukkan nilai nominal yang kian meningkat, dengan perubahan berupa kenaikan masing-masing dana sendiri rata-rata sebesar 22,73% dan dana luar rata-rata sebesar 9,22%.

Dana luar berupa dana masyarakat (yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito) pinjaman yang diterima serta setoran jaminan bank, menampakkan kenaikan yang cukup berarti, dengan kenaikan yang relatip besar pada deposito. Perolehan dana melalui deposito pada tahun 1986 sebesar Rp 2.352.974 ribu sedangkan jumlahnya untuk tahun 1985 adalah Rp 907.128 ribu, sehingga dicapai kenaikan sebesar Rp 1.445.846 ribu atau 159,38%. Demikian pula halnya dana yang terhimpun melalui tabungan mengalami peningkatan. Tahun 1986 jumlah tabungan yang berhasil dihimpun sebesar Rp 975.763 ribu, jumlahnya untuk tahun 1985 adalah sebesar Rp 674.744 ribu atau terjadi peningkatan sebesar Rp 301.019 ribu atau 44,61%. Terjadinya peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat, tidak lepas kaitannya dengan kebijaksanaan deregulasi perbankan tahun 1983, dan juga merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

2. Perkreditan

Pemberian kredit diutamakan pada sektor yang mendorong pengembangan perekonomian daerah dan tertuju pada usaha-usaha yang produktip. Pinjaman yang diberikan baik berupa kredit umum, kredit program maupun pinjaman lainnya disalurkan melalui semua Kantor Cabang ke pelosok daerah. Penyaluran kredit tersebut menyebar di berbagai bidang usaha baik di sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, konstruksi dan perhubungan. Dalam konteks demikian terlihat upaya guna turut mendukung pembiayaan dalam rangka pembangunan.

Perkembangan Sumber Dana BPD Maluku
Tahun 1984 - 1986
(dalam ribuan rupiah)



Sejak tahun 1985 jumlah modal disetor telah melampaui Rp 3 milyar (Rp 502.874 ribu) yang dimasukkan sebagai dana setoran modal. Jumlah ini akan dipindahbukukan ke dalam rekening modal, apabila telah ada peraturan daerah yang menetapkan perubahan atas besarnya modal statuter BPD Maluku.
Selanjutnya dalam tahun 1986 jumlah kelebihan modal disetor yang dimasukkan sebagai dana setoran modal meningkat menjadi Rp 1.435.845 ribu atau terjadi peningkatan sebesar 185,52%.
Sementara itu jumlah dana sendiri secara keseluruhan pada tahun 1984 sebesar Rp 3.615.657 ribu, meningkat pada tahun 1985 sebesar Rp 4.256.507 ribu atau 17,72%. Pada tahun 1986 meningkat lagi sebesar Rp 5.437.595 ribu, atau terjadi peningkatan dari tahun 1985 sebesar 27,74%.

Dalam tahun 1986 pinjaman yang diberikan yang mencakup pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang berjumlah Rp 20.937.000 ribu. Hal ini bila dibandingkan dengan jumlah tahun 1985 sebesar Rp 17.880.000 ribu, berarti terjadi kenaikan sebesar Rp 3.057.000 ribu atau 17,09%. Untuk jelasnya akan diuraikan pemberian kredit menurut jenis dan jangka waktu pada tabel 1.

Dalam struktur perkreditan secara keseluruhan sampai dengan tahun 1986 ini terdapat peningkatan, baik dari segi kualitatip maupun kuantitatip. Ditinjau dari segi kualitatip dapat dilihat bahwa jenis pinjaman yang diberikan bertambah. Penyaluran kredit investasi biasa (dana sendiri) mulai dirintis, demikian pula halnya dengan pemberian KMK Keppres 29/1984 yang merupakan peng-

Tabel 1.
Pemberian Kredit Menurut Jenis Dan Jangka Waktu Tahun 1984-1986

(dalam ribuan rupiah)

Jenis Kredit	1984		1985		1986	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Jangka Pendek :						
- Kredit Biasa/RC	14.583.964	88,25	13.930.871	77,91	15.094.426	72,09
- KMK s/d Rp 75 juta	18.334	0,11	89.000	0,50	593.431	2,83
- KMK Keppres 29/84	—	—	520.005	2,91	726.428	3,47
Sub Jumlah (A)	14.602.298	88,36	14.539.876	81,32	16.414.285	78,39
Jangka Panjang :						
- K I K	322.287	1,95	414.203	2,32	462.028	2,21
- K M K P	236.771	1,43	606.109	3,39	1.132.739	5,41
{ KI s/d Rp 75 juta	604.958	3,66	990.760	5,54	976.450	4,66
- KI Biasa (D. send.)	—	—	532.000	2,97	1.099.491	5,25
- Krd. Prof. Guru	677.951	4,10	732.459	4,10	804.455	3,84
- Pinjaman Pegawai	81.874	0,50	64.791	0,36	49.341	0,24
Sub Jumlah (B)	1.923.841	11,64	3.340.322	18,68	4.524.504	21,61
Jumlah (A + B)	16.526.139	100,00	17.880.198	100,00	20.938.789	100,00

alihan dari KMK Keppres 14 A/1980. Pemberian KI sampai dengan Rp 75 juta dan KMK sampai dengan Rp 75 juta pada tahun 1986, baru berlangsung dua tahun, namun jumlahnya relatip meningkat masing-masing rata-rata 31,16% dan 476,10%.

Dimulainya penyaluran kredit investasi biasa (dana sendiri) turut memperbesar nilai nominal penyaluran kredit jangka panjang tahun 1986, sehingga mencapai jumlah Rp 4.524.504.000,00. Apabila dibandingkan dengan jumlah tahun 1985 (Rp 3.340.322.000,00), maka berarti terdapat kenaikan sebesar 35,45%.

Dari segi jangka waktu, nilai nominal pinjaman jangka pendek menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada pinjaman jangka panjang. Namun apabila perkembangan laju kenaikan penyaluran pinjaman dari tahun 1984 hingga tahun 1986 disimak, tampak bahwa kenaikan pinjaman jangka panjang yang diberikan relatip lebih besar daripada pinjaman jangka pendek.
Hal ini terlihat dari persentase kenaikan realisasi pinjaman jangka panjang yang mencapai 54,53% per tahun selama periode 1984 - 1986. Pada periode yang sama laju kenaikan pinjaman jangka pendek yang disalurkan adalah 6,65% setiap tahunnya.

3. Pengelolaan Kas Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor Kpts 577/Gmal/1979 tanggal 10 Oktober 1979, maka BPD Maluku berfungsi pula sebagai pemegang Kas Daerah Tingkat I Maluku. Sejak tahun 1986 pelaksanaan fungsi tersebut juga mencakup Kas Pemerintahan Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Maluku Tenggara serta Kotamadya Ambon. Perkembangan Kas Daerah sejak tahun 1979/1980 hingga 1986/1987 dapat diamati pada tabel 2.

4. Kegiatan Bank Lainnya

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD Maluku juga menyelenggarakan kegiatan transfer/pengiriman uang dari Kantor Pusat ke Kantor-kantor Cabang dan sebaliknya. Disamping itu sejak tahun 1984 dilaksanakan pengiriman uang dalam rangka kerja sama dengan BPD lain. Dalam kaitan ini yang telah berlangsung ialah kerja sama dengan BPD DKI Jaya dan BPD Jawa Timur, BPD Yogyakarta dan BPD Irian Jaya.

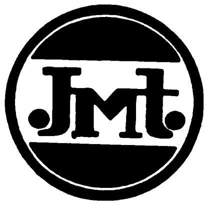
Arus pengiriman uang dari Kantor Pusat ke Cabang-cabang dalam tahun 1984 berjumlah Rp 584.998.000 selanjutnya dalam tahun 1985 meningkat sebesar Rp 2.483.429.000 dan pada tahun 1986 berjumlah Rp 19.255.235.000. Jadi rata-ratanya terjadi kenaikan tiap tahun sebesar Rp 9.335.118.000 atau 499,94%.
Sedangkan dari Kantor-kantor Cabang ke Kantor Pusat, perkembangannya dalam tahun 1984 sebesar Rp 400.866.000, tahun 1985 sebesar Rp 968.913.000 dan pada tahun 1986 berjumlah Rp 22.267.971.000, atau tiap tahunnya terjadi kenaikan rata-rata sebesar Rp 10.933.552.000 atau 1.169,97%.

Tabel 2.
Pengelolaan Kas Daerah Tahun 1979/1980 - 1986/1987

(dlm ribuan rupiah)

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Keterangan	
1979/1980	16.548.366	15.169.094	Saldo per 31 Maret 1980	Rp 1.379.273,00
1980/1981	24.406.579	21.563.315	Saldo per 31 Maret 1981	Rp 4.222.536,00
1981/1982	27.839.251	26.675.641	Saldo per 31 Maret 1982	Rp 5.386.146,00
1982/1983	36.389.601	31.044.083	Saldo per 31 Maret 1983	Rp 5.345.518,00
1983/1984	33.392.501	30.662.044	Saldo per 31 Maret 1984	Rp 8.884.016,00
1984/1985	18.352.493	16.543.912	Saldo per 31 Maret 1985	Rp 9.884.596,00
1985/1986	19.871.628	19.327.453	Saldo per 31 Maret 1986	Rp 10.428.771,00
1986/1987	29.087.665 *)	27.910.287	Saldo per 31 Maret 1987	Rp 1.177.378,00

Catatan :
Jumlah penerimaan/pengeluaran 1984/1985 dan 1985/1986 mengecil, karena pembayaran gaji pegawai negeri/daerah dialihkan ke Kas Negara sejak tahun 1984.
*) Terdiri dari penerimaan tahun 1986/1987 (Rp 18.658.894 ribu) dan saldo tahun sebelumnya (Rp 10.428.771 ribu).



P.T. JATI MALUKU TIMBER

Industri Perkayuan Terpadu Dari Jati Maluku Timber Group.

JATI MALUKU TIMBER GROUP, IN INTEGRATED WOOD INDUSTRY

Pendahuluan.

Pembangunan pabrik plywood PT. Jati Dharma Indah dan PT. Jati Cahaya Cemerlang ini sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan industri dalam negeri dan usaha pengalihan aktivitas expor kayu gelondongan/logs ke bahan yang telah diolah dengan maksud untuk mendapat nilai tambahan dan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah Maluku, sesuai pula dengan SKB Tiga Menteri bulan Maret 1981.

Nama Perusahaan Industri :

1. PT. Jati Dharma Indah SPT. No. 38/I/PMDN/1981 tgl. 23 Maret 1981 dengan kapasitas Output 68.600 M3 plywood dan 14.000 M3 block board.
   Input 165.000 M3 logs per tahun mulai dibangun tgl. 12 September 1981, dan mulai produksi komersil bulan Maret 1983 disusul dengan mulai expor plywood bulan Agustus 1983.

2. PT. Jati Cahaya Cemerlang SPT. No. 167/I/PMDN/1981 tgl. 23 Nopember 1981 dengan kapasitas Output 68.500 M3 plywood dan 14.000 M3 block board.
   Input 159.000 M3 logs per tahun mulai dibangun tgl. 5 Juni 1982 dan mulai produksi komersial bulan Januari 1984 disusul dengan mulai expor plywood bulan Maret 1984. Lokasi pabrik plywood tsb diatas terletak di Batu Gong diatas tanah seluas 62 Ha. Kodya Ambon Propinsi Maluku.

3. PT. Jati Maluku Timber (saw-mill) SPT. No. 16/II/PMDN/1979 tgl. 19 Maret, dengan Output 12.000 M3/Thn dengan lokasi di Babang P. Bacan (Maluku Utara).

Introduction

*The establishment of plywood industry of **PT Jati Dharma Indah** and **PT Jati Cahaya Cemerlang** conforms with government policies to promote domestic industries and to replace log export by manufactured wood with a view to increasing the value-added and expanding employment opportunities as well as stepping up economic activities of Maluku region. It also agrees with the joint letter of decision enacted in March 1981.*

Titles of the Industrial Enterprises

1. *PT Jati Dharma Indah. Permanent Approval No 38/I/PMDN/1981 dated 3rd March 1981. Output capacity : 68,600 M3 of plywood and 14,000 M3 of block board. Annual input : 165,000 M3 of logs. Built since 12th September 1981. Commercial production since March 1983. First shipment of plywood export in August 1983.*

2. *PT Jati Cahaya Cemerlang. Permanent Approval No 167/I/PMDN/1981 dated 3rd November 1981. Output capacity : 68,500 M3 of plywood and 14,000 M3 of block board. Annual input : 159,000 M3 of logs. Built since 5th June 1982. Commercial production since January 1984. First shipment of plywood export in March 1984. Plant location on an area of 62 Ha in Batu Gong, Ambon Municipality, Province of Maluku.*

3. *PT Jati Maluku Timber (Saw mill). Permanent Approval No 16/II/PMDN/1979 dated 19th March 1979. Output capacity : 12,000 M3 per annum. Location in Babang, Bacan Island, Northern Maluku.*



Hutan alam dalam HPH. Jati Maluku Timber



Pembibitan untuk hutan tanaman Industri PT. Jati Maluku Timber.



Borter dalam pabrik Plywood Jati Cahaya Cemerlang.

Tenaga Kerja

Pada dewasa ini dengan 2 shift kerja, tenaga kerja adalah sebagai berikut.
PT. Jati Dharma Indah :
1.450 orang tenaga kerja Indonesia 4 orang Asing.
PT. Jati Cahaya Cemerlang :
1.127 orang tenaga kerja Indonesia
PT. Jati Maluku Timber :
50 orang Indonesia di Saw-mill, untuk pengolahan kayu (logging) 600 orang 4 orang Asing.
Sebagian besar tenaga kerja adalah tenaga lokal, sedangkan tenaga dari P. Jawa hanya terbatas pada tenaga-tenaga yang trampil dengan pengalaman kerja di pabrik plywood.

Bahan Baku kayu gelondongan (logs)

Bahan baku diperoleh dari anggota Group Jati Maluku Timber yang mempunyai Konsesi Hutan (H.PH) sbb. :

1. PT. Jati Maluku Timber dengan luas areal HPH : 207.000 Ha dengan lokasi : P. Bacan, P. Obi, P. Halmahera (selatan), P. Bisa, P. Lifematola (Maluku Utara).
2. PT. Erihatu dengan luas areal HPH : 227.000 Ha dengan lokasi : P. Obi (Kelo), P. Halmahera (Tengah) (Maluku Utara).
3. PT. Brata Jaya Utama dengan luas areal HPH 85.000 Ha dengan lokasi : di P. Seram (Timur).
4. PT. Wanakrida dengan luas areal HPH : 47.500 Ha dengan lokasi : di P. Seram (Barat).
5. PT. Asmara Hayu dengan luas areal : HPH 46.000 Ha dengan lokasi : P. Seram (Selatan).
6. Areal yang dicadangkan, sebagai tambahan areal PT. Jati Maluku Timber seluas 152.000 Ha berlokasi di Seram Selatan. Jumlah seluruh areal hutan, pendukung industri berjumlah : 763.500 Ha pada umumnya hutan terdiri dari hutan alam tropis dengan jenis kayu campuran dengan potensi rata-rata 30 M3/Ha.
   Maka mulai tahun 1988, Jati Maluku Group, dengan persetujuan Departemen Kehutanan akan memulai dengan Hutan Tanaman Industri (Timber Estate) yang khusus akan memproduksi jenis kayu untuk industri plywood dan kayu gergajian (Sawn-Timber) dengan potensi 250 M3/Ha.
   Jenis kayu yang dihasilkan untuk industri plywood ialah :
   1. Meranti Putih (Shorea Koordersii)
   2. Meranti Merah (Shorea Seylanica)
   3. Mersawa (Anisoptera Spec)
   4. Kenari (Canarium Sylvestris)
   5. Nyatoh (Palagium Moluccensis)
   6. Binuang (Oktomeles Spec)

   Jenis Untuk Penggergajian (Saw-Milling)
   1. K. Besi (Intsia Biyuga)
   2. K. Rau (Dracontemalum Spec)
   3. K. Bugis (Koordersio dendran spec)
   4. K. Lenggoa (Pterocorpus indicus)
   5. K. Matoa (Ponetia pinata)

Manpower

At present, with 2-shift operation, the number of manpower employed area as follows :
- PT Jati Dharma Indah : 1,450 Indonesian workers and 4 foreigners.
- PT Jati Cahaya Cemerlang : 1,127 Indonesian workers.
- PT Jati Maluku Timber : 50 Indonesian workers for saw-mill, and 600 Indonesian workers and 4 foreigners for logging.
Most of the personnel are local hands while those from Java Island are skilled workers only, with the necessary experience in plywood manufacturing plants.

Raw Material (Log)

Raw material is supplied by members of PT Jati Maluku Timber Group which own forest concession as follows :

1. *PT Jati Maluku Timber. Forest concession of 207,000 Ha in the Islands of Bacan, Halmahera (Southern), Bisa, Lifematola (Northern Maluku).*
2. *PT Erihatu. Forest concession of 227,000 Ha in the Islands of Obi (Kelo) and Halmahera (Central) (Northern Maluku).*
3. *PT Brata Jaya Utama. Forest concessionl of 85,000 Ha in Seram Island (Eastern).*
4. *PT Wanakrida. Forest concession of 47,500 Ha in Seram Island (Western).*
5. *PT Asmara Hayu. Forest concession of 46,000 Ha in Seram Island (Southern).*
6. *Reserved area to supplement the concession area of PT Jati Maluku Timber, amounts to 152,000 Ha in Southern Seram. The total area to support the industrial activities makes up 763,500 Ha. In general, it is natural tropic forest of mixed logs with an average potential of 30 M3/Ha.*
   With approval from the Ministry of Forestry, PT Jati Maluku Timber Group is to start Timber Estate in 1988, particularly to produce logs for plywood industry and sawn timber with a potential of 250 M3/Ha.
   Wood species to be cultivated for plywood industry include :
   1. *Shorea Koordesii/White meranti*
   2. *Shorea seylanica/red meranti*
   3. *Anisoptera spec/mersawa*
   4. *Canarium sylvestris/kenari*
   5. *Palagium Moluccensis/nyaton*
   6. *Oktomeles spec/binuang*

   Wood species for saw-milling include :
   1. *Intsia biyuga/kayu besi*
   2. *Dracontemalum spec/kayu rau*
   3. *Koordersio dendran spec/kayu bugis*
   4. *Pterocorpus indicus/kayu lenggoa*
   5. *Ponetia pinata/kayu matoa.*



Ekspor kayu lapis dari pelabuhan Batugong Ambon.

Data Produksi dan pemasaran Plywood
Plywood production and marketing

Tahun *Year*	Produksi *Production* M3	Export M3	Penjualan Dalam Negeri *Domestic Sales* M3
1983	24.250,70	8.997,60	2.952,95
1984	68.787,87	59.591,31	4.831,65
1985	67.806,62	38.500,28	34.116,92
1986	53.675,88	32.378,09	16.809,24

Export market : Singapore, Hongkong, Taiwan.
Inter-insular : Manado, Jakarta, Surabaya.
Local : Ambon.

Tinjauan Ekonomi : Pendirian Pabrik Plywood di Ambon.
Dari segi ekonomi terdapat keuntungan, baik untuk perusahaan sendiri, maupun dilihat dari sudut kebijaksanaan pemerintah antara lain :

a. Lokasi pabrik dekat Kota Ambon mempunyai Keuntungan yaitu relatif mudah dicapai dari beberapa pulau di Maluku Utara, maupun Maluku Tengah dimana terdapat areal HPH milik Jati Group yang akan memenuhi bahan baku utama yaitu kayu gelondongan (logs).
b. Keadaan infra struktur dan sekitarnya cukup memadai, sehingga menjamin kelancaran operasi pabrik dan pemasaran produksi.
c. Terbuka lembaran baru dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah.
d. Terbuka kesempatan kerja baru dan terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia.
e. Terrealisasi usaha diversikasi expor dan bertambah perdagangan antar Pulau.
f. Peningkatan pendapat Daerah.

Investasi dalam bidang Industri

1. PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries : Rp 18.000.000.000,-
2. PT. Jati Cahaya Cemerlang Plywood Industries : Rp 14.000.000.000,-
3. PT. Jati Maluku Timber Saw-mill Industries : Rp 1.500.000.000,-

Economic Review : Plywood Manufacturing Establishment in Ambon extends the following economic benefits, as regard entpreneurship as well as government policies :

a. The seat of the manufacturing establishment in the vicinity of Ambon City is easily accessible from a number of islands in Northern as well as Central Maluku where the Jati Group forest concessions are located.
b. The existing infrastructures are appropriate to enhance production and marketing activities.
c. It constitutes a new leaf for the development of economic activities in the region.
d. It provides new employment opportunities and promotes an equitable distribution of development in Indonesia.
e. It promoses export diversification and increases the volume of inter-insular trade activities.
f. It steps up regional revenue.

Investment for Industrial Enterprise

1. PT Jati Dharma Indah Plywood Industries : Rp. 18,000,000,000.
2. PT Jati Cahaya Cemerlang Plywood Industries : Rp 14,000,000,000.
3. PT Jati Maluku Timber Sawmill Industries : Rp 1,500,000,000.



Pembuatan Plywood dalam pabrik Jati Dharma Indah Batugong. Ambon.

INDONESIA TANAH AIRKU PRODUKSI DALAM NEGERI KEBANGGAANKU

Propinsi IRIAN JAYA



SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

Informasi pembangunan kini merupakan hal yang penting bagi bangsa kita dalam upaya menggalakkan kesinambungan pembangunan Nasional di Nusantara ini. Karena informasi pembangunan, tidak sekedar memberitahukan sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan saja, tetapi juga akan memperlihatkan secara terinci upaya pembangunan dengan berbagai tantangan yang selalu siap menghadang, serta rincian hasil yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Keberhasilan itu sendiri adalah hasil kerja keras Pemerintah dengan kesadaran partisipasi penuh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Irian Jaya.

Itulah sebabnya saya sangat bergembira melihat penerbitan buku "INDONESIA MEMBANGUN" yang merupakan upaya nyata untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan di tanah air.
Demikian pula buku ini, merupakan dokumentasi pembangunan yang bisa memberikan gambaran luas tentang tahap-tahap kemajuan yang telah dicapai di Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

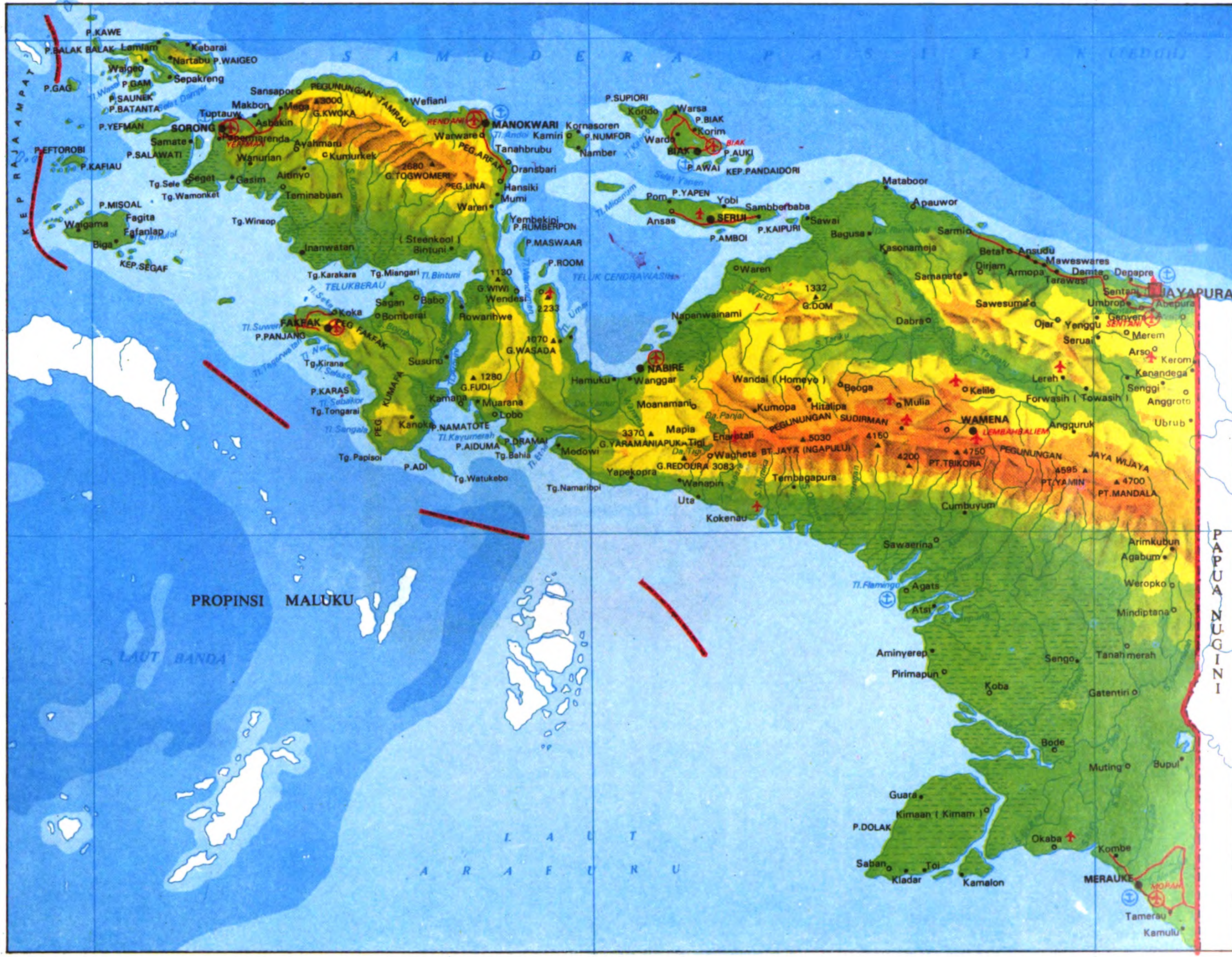
Akhirnya saya mengharapkan kiranya buku ini dapat menggugah para penanam modal dan wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini serta ucapan terima kasih saya atas prakarsa penerbitan buku "Indonesia Membangun".

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA



IZAAC HINDOM


IRIAN JAYA



SAMUDERA PASIFIK
KEP RAJA AMPAT
P.KAWE
P.BALAK BALAK
Lamlam
Kabarai
Nartabu
P.WAIGEO
Waigeo
P.GAG
P.GAM
Sepakreng
P.SAUNEK
P.BATANTA
P.YEFMAN
SORONG
Samate
P.SALAWATI
P.EFTOROBI
P.KAFIAU
Seget
Tg.Sele
Tg.Wamonket
P.MISOOL
Fagita
Waigama
Fafanlap
Biga
KEP.SEGAF
Sansapor
Makbon
Tuptauw
Asbakin
Wanurian
Ayahmaru
Kumurkek
Aitinyo
Teminabuan
Gasim
Tg.Winsop
Inanwatan
PEGUNUNGAN TAMRAU
G.KWOKA
3000
Wefiani
MANOKWARI
Warware
PEG.ARFAK
Tanahbrubu
Oransbari
2680
G.TOGWOMERI
PEG.LINA
Hansiki
Mumi
Wareri
Yembekiri
P.RUMBERPON
P.MASWAAR
(Steenkool)
Bintuni
Tl.Bintuni
Tg.Karakara
Tg.Miangari
TELUKBERAU
Koka
Sagan
Babo
Bomberai
FAKFAK
PEG FAKFAK
P.PANJANG
Tg.Kirana
P.KARAS
Tg.Tongarai
PEG KUMAFA
Kanoka
Susunu
1280
G.FUDI
Kamana
Muarana
Lobo
P.NAMATOTE
P.AIDUMA
P.DRAMAI
Tg.Bahia
Tg.Papisoi
P.ADI
Tg.Watukebo
1130
G.WIWI
Wendesi
Rowarihwe
2233
1070
G.WASADA
P.ROOM
TELUK CENDRAWASIH
P.SUPIORI
Korido
Warsa
P.BIAK
Korim
Wardo
BIAK
P.AUKI
P.AWAI
KEP.PANDAIDORI
Kornasoren
Kamiri
P.NUMFOR
Namber
Pom
P.YAPEN
Yobi
Sambberbaba
Ansas
SERUI
P.AMBOI
P.KAIPURI
Mataboor
Apauwor
Sawai
Bagusa
Sarmi
Kasonameja
Betaf
Ansudu
Maweswares
Dirjam
Armopa
Demta
Depapre
Tarawasi
Samapete
JAYAPURA
Sentani
Abepura
Waren
1332
G.DOM
Napanwainami
Dabra
Sawesuma
Umbrop
Genyem
SENTANI
Ojar
Yenggu
Merem
Seruai
Arso
Kerom
Kanandega
Senggi
Anggroto
Ubrub
NABIRE
Hamuku
Wanggar
Wandai (Homeyo)
Beoga
Mulia
Kelile
Lereh
Forwasih (Towasih)
Moanamani
Kumopa
Hitalipa
PEGUNUNGAN SUDIRMAN
WAMENA
LEMBAHBALIEM
Angguruk
3370
Mapia
Enarotali
5030
4150
G.YARAMANIAPUKA
Tigi
Waghete
PT.JAYA (NGAPULU)
4200
4750
PT.TRIKORA
PEGUNUNGAN JAYA WIJAYA
Medowi
Yapekopra
G.REDOURA 3083
4595
PT.YAMIN
4700
PT.MANDALA
Tg.Namaripi
Wanapin
Tembagapura
Uta
Kokenau
Cumbuyum
Sawaerina
Arimkubun
Agabum
Weropko
Tl.Flamingo
Agats
Atsi
Mindiptana
Aminyerep
Sengo
Tanahmerah
Pirimapun
Koba
Gatentiri
Bode
Muting
Bupul
Guara
Kimaan (Kimam)
P.DOLAK
Okaba
Kombe
Saban
Toi
Kladar
Kamalon
MERAUKE
Tamerau
Kamulu
PROPINSI MALUKU
LAUT BANDA
LAUT ARAFURU
PAPUA NUGINI

B A B / *CHAPTER I*

MONOGRAFI / *MONOGRAPHY*

1. Keadaan Alam dan Iklim

PROPINSI Daerah Tingkat I Irian Jaya sebagai Propinsi yang paling luas wilayahnya dari seluruh Propinsi di Indonesia yang terletak di ujung timur negara mencapai ± 410.660 Km2. Terdiri dari pulau besar di Irian dan pulau lainnya yaitu : di sebelah utara kawasan Teluk Cendrawasih dengan Pulau Biak, Numfor, Surpiori, kepulauan Padaido, Owi, Yapen dan pulau kecil lainnya dekat Manokwari dan Nabire. Di sebelah barat dengan pulau Keluawan Raja Ampat dengan Waigeo, Salawati, Yefman, Gak dan lain-lain. Sedang di sebelah selatan dengan Pulau Panjang dan Adi di daerah Fak-Fak serta pulau Fredrik Hendrik di daerah Merauke.

Menurut letak Astronominya daerah Irian Jaya berada diantara 01°11" LS dan 10°45"00 LS serta garis bujur : 129°30'00 BT dan 141°01'10" BT dengan demikian daerah Irian Jaya membujur dari barat ke timur dengan selang 11° atau sejauh ± 1.200 Km (dari kota Sorong sampai dengan kota Jayapura), yang menimbulkan perbedaan waktu kedua tempat tersebut hampir 1 jam. Sedang lebar dari Utara ke Selatan sejauh ± 730 km (antara kota Jayapura dengan kota Merauke). Bagian Timur daerahnya berbatasan dengan Negara Papua New Guinea yang mengikuti garis meridian 141°01'00 BT dengan bagian selatannya dengan batas alam yaitu sungai Fly.

Di bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Seram dan Laut Arafura. Dan bagian selatan dibatasi oleh Laut Arafura dan Samudera Indonesia. Dengan demikian daerah Irian Jaya ditinjau dari fisik yang cukup strategis untuk lalulintas. Irian Jaya merupakan pintu gerbang Indonesia untuk bagian Timur, dengan Samudera Pasifiknya. Sedangkan di bagian selatan dekat dengan Benua Australia yang memungkinkan menjadi tempat persinggahan baik lalu lintas laut maupun udara.

Daerah Irian Jaya mempunyai Topografi yang kasar. Dari sejarah geologinya dapat diketahui bahwa dahulu banyak terjadi gejala-gejala pengangkatan dan penurunan kulit bumi dengan perbedaan yang cukup menyolok. Disamping itu dari sifat batuannya serta iklimnya yang mempunyai temperatur, kelembaban dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya proses denudasi yang berlangsung dengan hebatnya sehingga menambah tajamnya keadaan topografinya. Daerah pantai banyak terdapat dataran rendah yang sangat luas, tertutup dengan hutan Mangrofe, terutama untuk pantai utara yang dikenal sebagai lembah Sungai Membramo dan pantai selatan mulai dari lembah Timika, Agats hingga Lembah Sungai Digul.

Daerah-daerah daratan lain yang patut diperhatikan antara lain : Daerah pantai Utara. Dataran ini dikenal sebagai depresi Membramo Bawani terletak di sebelah selatan pegunungan Cyclops, disinilah danau Sentai terletak. Dataran ini lebih sempit yang terdiri dari hasil sedimentasi yang terlipat dan untuk daerah sepanjang pantai ditutupi oleh endapan alluvial.

Dataran Danau dikenal dengan sungai Indenberg, merupakan suatu depresi yang batas aliran Utara. Dataran Selatan terletak di sebelah selatan pegunungan Jayawijaya dengan kondisi bagian timurnya berawa-rawa sedangkan dibagian baratnya kering dengan posisi miring. Di sebelah selatan dataran itu ada suatu punggung yang tidak terlalu tinggi dikenal sebagai zone Merauke yang merupakan daerah sabana. Dataran rendah Kepala Burung, termasuk diantaranya adalah sebuah dataran, terletak antara zone utara dan zone tengah, Kepala Burung terdiri dari Dataran alluvial, lebih keselatan dipisahkan oleh zone Tengah terdapat dataran-dataran Ransiki Dataran Momi, Dataran Cransbari serta Dataran Warmare Prafi yang cukup subur.

Di Irian Jaya juga banyak terdapat pegunungan terutama di bagian tengahnya. Deretan atau rangkaian pegunungan utara memanjang dari Pulau Salawati-Batanta, Temarau dan Arfak diteruskan sebagai punggung dasar laut di Teluk Cendrawasih dengan bagian yang menonjol antara lain berupa Pulau Yapen. Jalur pegunungan ini terus ke timur menyambung dengan pegunungan Cyclops ke Papua New Guinea dengan pegunungan Bugenville.

Keadaan lereng dan puncaknya sangat curam antara lain : Kwoka untuk Pegunungan Tamarau, Umsini untuk Pegunungan Arfak. Pegunungan Cyclops, bagian Barat dan Timurnya terdiri dari karang muda yang terangkat ± 400 m di atas permukaan laut, sehingga laut yang semula menjorok ke daratan terputus dengan laut bebas, diantaranya terbentuk daerah Sentani. Di bagian tengah terdapat Pegunungan Batas Aliran atau dikenal sebagai Pegunungan Van Rees. Pegunungan ini memisahkan dua bagian aliran sungai yaitu Sungai yang mengalir

1. Geography and Climate

THE PROVINCE of Irian Jaya which is located in the Eastern part of Indonesia has the largest area among all the Indonesian provinces namely 410,660 km2. It consists of a half of the main island and some small islets in the North of Cendrawasih Bay namely Biak, Numfor, Surpiori, Padaido group of islets, Owi, Yapen and other islets near Manokwari and Nabire, In the west is the Raja Ampat group of islets, namely Waigeo, Salawati, Yefman, Gak and others. On the South there are Panjang and Adi islets in Fak-Fak and Fredrik Hendrik islet in Merauke.

Irian Jaya is located from 01°11' to 10°45' South Latitude and from 129°80' to 141°01'10" East Longitude streching out 11° from west to east or 1,200 km (from Sorong to Jayapura city) which cause a time difference of almost one hour. The width of this province from north to south is approximately 730 km (from Jayapura to Merauke city). The Eastern part of Irian Jaya borders with Papua New Guinea which is on 141°01' East Longtitude and in the south a natural border, river Fly. In the north the province borders with the Pacific Ocean, Seram and Arafura Sea and in the south the Arafura Sea and Indian Ocean. Thus Irian Jaya province is strategically located; it is the entrance gate from the Pacific Ocean and a sea as well as air transito from traffic coming in from Australia.

Irian Jaya has a rough topography. Its geological history uncovers previous rising and falling of the surface of the earth. Its types of stones, its climate which is of high temperature and humidity level causes a process of tremendous denudation which sharpen the topography features. In the coastal area there are vast low-lands, covered which mangrove forests, especially in the north coast which is known as Membramo river valley and the south coast from Timika valley, Agats to Digul river valley.

Other plains which need attention are among others; the North coastal area. This terrain, known as Membramo Bewani depression area, is located south of Cyclops mountain range where Sentani lake is. This plain is narrower, consisting of sendimentation layers and along the coastal area it is covered by alluvial sendiment.

The valley of the lake which is known as Indenberg river, is the border of the North stream. The Southern valley which is located in the southern Jayawijaya mountain range, is very swampy in the east, whereas the western part is dry with a sloping position. In the south of the valley there is a savannah known as Merauke zone. The Kepala Burung low-land, included a valley, located between the North and Central zone consists of alluvial plains, and more to the south it is divided by a central zone where there are the more fertile valleys of Rasinki, Momi, Oransbari plain and Warmare Prafi.

In Irian Jaya there are also many mountain ranges, especially in its central part. The chain of mountains in the north streches from Salawati - Batanta, Temarau and Arfak to the sea in Cendrawasih Bay and goes further into the sea where a part will reappear at the surface to become the Yapen Island. This mountain range goes to the east and links with the Cyclons and Bugenville mountain range in Papua New Guinea.

The slopes of mount Kwoka of Tamarau Mountain range, and that of mount Umsini of Arfak mountain range are very steep. The west and eastern part of Cyclons mountain range consist of young reefs which elevated approximately 400 above sea level, cutting off the seawater, which formed a bay, to return to sea, and created the Sentani area.

In the central part of this province is the Batas Aliran mountain range or known as Van Rees mountain range. This mountain range divides two river basins, namely the river which flows to Arafura Sea (Tariku and Turafatu rivers) and the rivers which flow to the Pacific Ocean. The peak of this mountain range reaches 2,200 m above sea level.

The Jayawijaya mountain range, running through the centre part of the province is the backbone of Irian Island with its peaks always covered by eternal snow, namely Jaya Peak (5,500 m), Trikora Peak (5,160 m), and Yamin Peak (5,100 m). This Jayawijaya mountain range is connected with Kaimana mountain range and is linked with the mountain range in Kepala Burung by a narrow isthmus. Its rough topography with its quite steep slopes, especially the south slopes, makes expedation teams to always climb from the north slope.

In Bomberai peninsula there is the chain of mountain range which constitutes the most southern mountain range in Irian Jaya. The mountain range streches from northwest to the southeast with to the southeast with the highest peak of 1,500 m. To the East this mountain range becomes lower with sloping area, but will rise again at its connection with the mountain range which comes from Kepala Burung. From geological aspects the chain of mountains in

ke Laut Arafura (Sungai Tariku dan Sungai Tarafatu) serta sungai yang mengalir ke arah Samudera Pasifik. Puncak pegunungan ini ada yang mencapai 2.200 m di atas permukaan laut.

Pegunungan Jayawijaya merupakan deretan pegunungan bagian tengah yang merupakan tulang punggung Pulau Irian, dengan puncaknya selalu diliputi salju abadi yaitu : Puncak Jaya 5.500 m, Puncak Trikora 5.160 m dan Puncak Yamin 5.100 m di atas permukaan laut. Pegunungan Jayawijaya ini bersambung dengan sistem Pegunungan Kaimana dan menjadi satu dengan Pegunungan dari Kepala Burung oleh suatu isthmos sempit. Topografinya kasar dengan lereng yang curam terutama lereng Selatan, sehingga ekspedisi pendakian selalu melalui Lereng dari Utara.

Pada jazirah Bomberai terdapat deretan pegunungan yang termasuk paling selatan di daerah Irian. Membujur dengan arah Barat Laut Tenggara dengan puncak tertinggi ± 1.500 m. Ke arah Timur Pegunungan ini bertambah rendah dengan lereng yang landai, kemudian naik lagi dan bertemu dengan deretan pegunungan yang berasal dari Kepala Burung. Dari segi geologinya deretan pegunungan tengah di Irian Jaya termasuk rangkaian pegunungan muda yang sampai sekarang masih dalam pembentukannya.

Sebagian besar berupa bentukan sedimen baik berasal dari bahan yang diendapkan dalam air laut maupun dalam air tawar, yang saat ini terletak ± 5.000 m di atas permukaan laut padahal dahulunya merupakan dasar suatu lautan.

Pada jaman kwartair endapan terbesar sangat luas, biasanya merupakan endapan-endapan teras yang horizontal dan transgressive. Terdiri dari sebagian besar konglomerat, batu kerikil, pasir dan lapisan tipis mollusca, di pantai Utara Irian Jaya terdapat pulau-pulau koralnya, pulau kwartair yang terangkat di permukaan laut, misalnya pulau Rumberpon, Padaido. Menurut Moddix & Massinger bagian Tenggara Wapoga terdapat endapan batu gamping koral, terletak di atas lapisan Pliacene atas merupakan daerah yang luas sampai ± 500 m di atas permukaan laut. Dengan adanya batuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada jaman kwartair ada hubungan laut dengan Teluk Cendrawasih dengan Dataran Sungai dengan Sarmi Sp, dan Gonio phona Sp.

Pada jaman Perm batu pasir marey kelabu dan batu gamping dengan Bryozoa. Pada jaman Mesozoicum, khususnya di geosinklinal pegunungan Jayawijaya masih tetap berlangsung endapan. Batuan terbentuk pada jaman Jura dan jaman Trias tersebar di mana-mana.

Pada jaman Jura batuan yang terdapat di lereng selatan pegunungan Jayawijaya sebagai alkali tanah, dengan batu dan fosil-fosilnya pada :

- Batu pasir batu halus : Coelocerat moernani Kuniz.
- Batu gamping hitam : Macrocephates, Belemnites dan Inoceramus.
- Liliceons shle : Quenstedticeras dan Inoceramus.

Pada jaman Kapur Bawah, terdapat sebagai alkali tanah liat dalam geode-geode di jazirah Doberai ditemukan tragen teoplites.

Pada jaman Tertier, endapan pada jaman ini merupakan batuan sedimen yang paling luas dan banyak. Ditemukannya minyak di batuan endapan tertier ini di jazirah Doberai Selatan (Wasior, Mogoi dan Munturi). Batuan Tertier Bawah di Irian Jaya pada umumnya merupakan dua facies :

- Batu gamping foraminiferal, terjadi dari endapan-endapan laut dangkal di daerah semenanjung pegunungan Jayawijaya dengan tepian-tepian dari jazirah Doberaidi Barat sampai di bagian ekornya di Timur.
- Konglomerat, batu kapur facies terdapat di daerah pegunungan pantai Utara membentang mulai dari Mamberamo sampai di Mady di PNG.

Daerah Irian Jaya mempunyai banyak sungai, danau dan rawa-rawa dari mulai berskala kecil sampai yang besar menembus daerah pedalaman seperti Digul yang menembus pedalaman Merauke, Mamberamo yang memutuskan daerah pedalaman Kabupaten Jayawijaya, Yapen Waropen, Paniai dan Jayapura. Fungsi sungai terutama yang besar merupakan faktor prasarana perhubungan yang dapat memungkinkan terbukanya daerah pedalaman yang terpencil dan terisolir.

Selain itu sungai di Irian Jaya sangat potensial untuk berbagai jenis ikan dan buaya.

Danau besar ataupun kecil di daratan Irian Jaya dekat pantai pedalaman, diantaranya merupakan danau pegunungan yang terletak 1.300 - 4.000 meter diatas permukaan laut. (D. Paniai, Tarmun Habbena dan Anggi). Dengan demikian banyak Danau di Irian Jaya yang potensial untuk kepentingan : Irigasi, Perikanan, Sumber tenaga dan proyek wisata). Lihat Tabel I-1.

Daerah rawa-rawa di Irian Jaya terdapat di daerah Pantai Selatan, bagian Selatan Kepala Burung, Pantai Utara mulai dari Waropen sampai Jayapura serta dataran di kiri kanan Sungai Tariku dan Sungai Taritatu.

Central Irian Jaya is considered of the young mountain range which is still in development process.

They are partly in the form of sediment both originating from the materials deposited either in the sea water or fresh water, which are today situated at about 5,000 metres above sea level but was formerly the seabed.

A massive sediment, usually horizontal and trangressive sedimental clay is a deposit originating from the Quartary period. In the northern shore of the region, the islands of Rumberpon and Padaido for instance, there are the coral islands which were conglomerates of small stones emerged to sea surface sand and mollusc remains and deposits from the Quartary period.

According to Moddix and Massinger, the deposit of coral limestone is found in the southeastern part of Wapoga, situated on the upper part of Plianene layer, which is a wide area of up to about 500 metres above sea level. From the said findings of sedimental limestone, a conclusion was taken that during the Quartary period the Cendrawasih gulf and river basins of Sarmi Sp and Gonio phona Sp were connected with each other.

During the Early Stone period, greysih marey sandstone and limestone with Bryozoa fossils were found. During the Mesozoicum period, especially in the geosinclinal mountaineous areas of Jayawijaya, the process of sedimentation continued to take place. The stone sediments were formed during the Jurasic and the Triasic period, and were found every where.

During the Jurasic period, the sediments found in the southern slope of Jayawijaya Mountain as the alkali soil along with stones and the fossils were as follows :

- *Soft sand stones : Coelocerat moernani Kuniz*
- *Black lime-stone : Macrocephates, Belemnites and Inoceramus*
- *Liliceons shle : Quenstedticeras and Inoceramus*

During the Lower lime period, the alkali clay was found in the geodes on the Doberai Cape where tragen teoplites was found. During the Tertiary period, the deposit was composed from lots of various sedimental stones. Oil was found among the tertiary sedimental stone on the South Doberai Cape (Wasior, Mogoi and Munturi). The Lower Tertiary sedimental stones in Irian Jaya were generally composed of two species, namely :

- *Foraminipheral lime stone, formed by the sediments in the shallow sea in the cape of the mountainous areas of Jayawijaya by the sides of Western Doberaidi to the other end of the island in the east, and*
- *Conglomerate, lime-stone species were found in the mountainous areas in the North coast spreading from Mamberamo to Madi of Papua New Guinea.*

There are numerous rivers, lakes and swamps in Irian Jaya, varying from the small until the big ones penetrating the remote areas like the Digul which passes the territories of Merauke and Membramo, and even deeper in the territories of Jayawijaya, Yapen Waropen, Paniai and Jayapura. The rivers in this region, especially the large ones, function as the principal transportation means, linking remote villages with other developing or developed villages and towns. Those rivers are also the habitat of various kinds of fish and crocodiles.

Irian Jaya has 13 lakes, of which Lake Paniai, Taruman Habbena and Anggi are situated at an elevation ranging from 1,300 m to 4,000 m above sea level, making them very potential for the interest of irrigation, fresh-water fishery, and hydro-electric power as well as tourist objects. See Table I-1

The swampy areas where plants of sago, mangrove, pandanus and thatch palm are growing, are found at the region's southern coastal area, northern coastal area stretching from Waropen to Jayapura, southern part of Kepala Burung area and some parts of Tariku and Tarituhu river basins (seasonal swamps). Those areas are indeed very spareely populated.

Tabel / *Table I — 1*

DANAU—DANAU DI DAERAH IRIAN JAYA
LAKES IN IRIAN JAYA

Nama Danau ***Name of Lake***	**Daerah Lokasi** ***Location***	**Luas (Ha)** ***Area (Ha)***
1. Sentai	Javapura	9.630
2. Ronbebai	Javapura	13.470
3. Anggi Giji	Manokwari	—
4. Anggi Gita	Manokwari	2.000
5. Yamur	Sorong	4.500
6. Ayamaru	Sorong	2.200
7. Yawasi	Sorong	2.500
8. Paniai	Paniai	14.150
9. Tage	Paniai	2.400
10. Tigi	Paniai	3.000
11. Tonjidat	Teluk Cenderawasih	—
12. Rawa Biru	Merauke	—
13. Rawa Moyo	Merauke	—

Sumber Data : Bulletin UDNP, Agoa Culture Development Irian Jaya, 1975
Source : Bulletin of UNDP on Aqua Culture Development in Irian Jaya 1975.

Sifat dari rawa-rawa yang 'musiman' artinya kalau musim hujan menjadi rawa dan kalau musim kemarau rawanya menjadi kering. Namun demikian ada rawa yang sepanjang tahun tidak pernah kering (antara lain di Pantai Utara).

Dilihat dari sifatnya, pengelolaan potensinya masih sangat terbatas, untuk Pantai Selatan tanahnya sudah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi. Sedangkan dari segi perikanan belum ada manfaatnya disebabkan rawa-rawa tersebut justru daerah yang kurang penduduknya. Adapun jenis vegetasi yang dominan untuk daerah rawa-rawa ini antara lain : Sagu, Mangrove, Pandanes dan Nipah.

Irian Jaya dikelilingi oleh laut dengan berbagai karakteristik pantainya. Pada umumnya daerah pantai sebelah utara sangat terjal-terjal, yang memungkinkan untuk pelabuhan-pelabuhan alam. Sebaliknya Pantai Selatan bagian Timur berbentuk landai, sehingga kurang potensi untuk pembangunan dermaga pelabuhan. Dalam kaitannya dengan fungsi laut sebagai prasarana perhubungan di Daerah Irian Jaya mempunyai karakteristik yang agak lain dengan sifat laut yang ada di Indonesia. Laut termasuk dalam arus eguatorial dari arah Timur menuju ke Barat. Hal yang lebih menonjol dari sifat laut di Irian Jaya dalam hubungannya dengan masalah pelayanan serta pasang surut laut dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu :

(1) Pasang surut rendah (0-1-0 m) terutama untuk sebagian besar Pantai Utara.
(2) Pasang surut sangat tinggi (4-5-8-5 m) terutama untuk pantai-pantai Irian Jaya Selatan.
(3) Pasang surut menengah (1-2-1 m) Pantai Barat.

Potensi laut di Irian Jaya yang sangat menonjol adalah mengenai kekayaannya akan hasil laut. Daerah Pantai Utara, kaya akan ikan cakalang, daerah Pantai Barat sampai Selatan terkenal akan udangnya. Selain dari pada itu tripang, tiram, rumput, rumput laut cukup besar dan baru sedikit yang dimanfaatkan. Termasuk diantaranya laut di Irian Jaya juga kaya akan berbagai jenis ikan hias.

Demikian pula kekayaannya akan berbagai jenis binatang kerang, menambah semaraknya keindahan laut di Irian Jaya, terutama untuk laut-laut di daerah Pantai Utara dan Barat.

Iklim

Keadaan iklim dipengaruhi oleh letak, baik letak Astronomis maupun letak Geografis. Sehingga keadaan iklim di beberapa daerah di Irian Jaya berbeda-beda. Secara keseluruhan daerah Irian Jaya termasuk dalam golongan Iklim Tropis dengan Hujan Hutan Tropis (Tropical Rain Forest). Konpen dan Geiger merupakan iklim yang dapat dibagi dalam dua type antara lain :

1. Irian Jaya bagian Tengah termasuk type Cfb, artinya mempunyai Iklim Panas yang hangat dan tidak pernah mengalami Musim Kering.
2. Daerah Irian Jaya lainnya termasuk type Af, artinya mempunyai Iklim Hujan Tropis dengan tidak mengalami Masa Kering.

Selain itu karena Irian Jaya terletak antara Benua Asia dan Australia maka keadaan iklimnya dipengaruhi oleh Angin Musim, yaitu :

a. Antara bulan Mei sampai Nopember bertiup angin Pasaat Tenggara dengan sifat-sifatnya relatif kurang mengandung Uap Air, terutama berpengaruh terhadap Irian Jaya bagian Utara.
b. Sekitar bulan Desember - April bertiup angin musim Barat Laut yang banyak mendatangkan hujan.

Apabila ditinjau dari iklimnya maka keadaan di daerah Irian Jaya dapat disebutkan bahwa rata-rata curah hujan di daerah Irian Jaya cukup tinggi, terutama daerah pedalaman (Nabire) curah hujan yang relatif rendah pada daerah Irian Jaya bagian Utara adalah di daerah Sentani dan di bagian Selatan adalah daerah Merauke dan di bagian Tengah adalah daerah Wamena, terutama pada bulan-bulan Mei-Nopember.

Temperatur Daerah Pantai berkisar antara 26°C - 17°C dengan rata-rata maksimumnya 32,1°C s/d 30°C dan minimumnya 24,4°C - 21,2°C, sedangkan maksimum berkisar antara 36,1°C s/d 33,2°C dan minimum antara 21,5°C s/d 13,5°C.

Temperatur daerah pegunungan pada umumnya berbeda secara gradual menurut ketinggiannya, yaitu dengan rata-rata penurunan 0,6°C untuk setiap kenaikan setinggi 100 meter di atas permukaan laut.

Keadaan kelembaban udara pada umumnya tinggi, hal ini disebabkan karena angin yang bertiup di daerah ini banyak yang berasal dari daerah lautan yang luas di sekeliling daerah Irian Jaya, sedangkan tekanan udara bervariasi sesuai dengan ketinggiannya di atas permukaan laut. Tabel I — 2

Lamanya penyinaran matahari di daerah Irian Jaya dari jam 08.00 - 16.00 WIT bervariasi antara 50 - 55% setiap hari untuk daerah Irian

The region's northern coast consists of mostly steep cliffs, a suitable condition for natural harbours, while the southern-east coast has a rather flat sandy shore. Different from other Indonesian seas characteristics, the region's seas are of equatorial current, drifting from east to west.

Concerning tides, the northern coast has rather low tide (0 - 1 - 0 m), the southern coast a relatively higher tide (4 - 5 - 8 - 5 m), and the western coast has moderate tide (1 - 2 - 1 m).

The region's seas are rich in marine products; the northern sea is rich in skipjack tunas fish, the western to southern seas rich in kinds of shrimps. Also found in those seas are sea cucumbers, oysters as well as seaweeds, in great quantities. In addition, ornamental fish are also found in certain parts of the seas, while many kinds of mussels are found generally in the western and northern seas.

Climate

Irian Jaya has a generally tropical climate. Parts of the region have indeed different climate owing to astronomical and geograpical location. According to Koppen and Geiger the central part of the region belongs to Cfb type, meaning it has fairly warmer tropical climate and wet season lasting throughout the year, while the other parts belong to Af type, meaning they have tropical rain climate for the whole year. In addition, being situated between Asia and Australia continents, the region, especially its northern part, is influenced by the south-east monsoon blowing usually from the months of December to April.

The region's average annual rainfall is fairly high, especially in the unplad regions. The relatively lowest rainfall, taking place from the months of May to November, occurs in Sentani area (in the norhtern part of the region), Merauke (in the southern part), and Wamena (in the central part).

The average temperature in coastal areas ranges from 17°C to 26°C with an average maximum from 32.1°C to 30°C and average minimum from 21.2°C to 24.4°C. The highest temperature is recorded between 33.2°C and 36.1°C, and the lowest between 21.5°C and 13.5°C. The temperature in the mountainous areas is variable according to their respective elevations, with the average decrease of 0.6°C for every increase by 100 metres above sea level.

Generally the region has a high degree of humidity because of the wind blowing over the territory is originating from vast oceans and seas around the region, while air pressure varies according to its elevation from sea level. See Table I-2.

Tabel / *Table I — 2*

RATA—RATA KECEPATAN ANGIN DALAM m/sec.
AVERAGE SPEED OF WIND IN METRE PER SECOND

Nama Kota *Name of town*	Rata-rata Pada Jam *Average speed at the time*			Tahun *Year*
	06.00	12.00	18.00	
1. Sentani	0,3	2,9	1,9	71 - 80
2. Biak	1,4	3,0	1,7	71 - 80
3. Manokwari	0,4	2,0	0,9	71 - 80
4. Sorong	2,6	3,2	3,7	71 - 75
5. Kaimana	0,3	2,1	0,9	71 - 75
6. Kokonao	0,5	2,8	1,7	71 - 75
7. Tanah Merah	0,3	2,1	0,6	71 - 80
8. Merauke	1,9	4,8	4,1	71 - 80
9. Serui	0,8	3,1	0,8	71 - 75
10. Nabire	1,3	2,7	1,1	76 - 80

Sumber : Meteorologi & Geofisika Irian Jaya.
Source : Meteorological and Geophysical Office of Irian Jaya Province.

In this region the sun shines from 08:00 AM to 04:00 PM (Eastern Indonesia Standard Time), which varies between 50 ton 55% of day time every day in the northern part (with the exception of Sarmi area having 30%) and between 44 to 58% of day time in the southern part (with the exception of Merauke area which reaches an average of 63%).

The northern part of the region is rather an area of active volcanoes and lies in an earthquake line of Pacific circumference. A relatively busy epicentre is located between 01° and 06° south latitude and between 130° and 140° east longitude, especially the areas situated between 02° and 04° south latitude and 130° and 140° east longitude. During the period 1979 to 1982 (June) 230 earthquakes with 3.5 to 6.3 scale of Richter and occured in this region.

2. Livelihood and Population

According to the 1980 population census, the number of workforce was 364,075 persons of whom 358,303 or about 98.4% had found employment.

Jaya bagian Utara terkecuali daerah Sarmi hanya berkisar antara 39%, sedangkan untuk daerah Irian Jaya bagian Selatan berkisar antara 44 - 58% terkecuali daerah Merauke sampai mencapai rata-rata 63%.

Sedangkan bagian Utara merupakan wilayah gempa bumi yang aktif serta terletak pada jalur gempa sirkum Pasifik. Daerah Episenter yang cukup padat terletak di daerah antara 01 - 06 Lintang Selatan dan 130 - 140 Bujur Timur terutama pada daerah-daerah antara 02 - 04 Lintang Selatan dan 136 - 140 Bujur Timur. Selama tahun 1979 s/d Juni 1982 tercatat gempa sebanyak kurang lebih 230 kali dengan kekuatan 3,5 - 6,3 Skala Richter.

2. Mata Pencaharian dan Penduduk

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980 jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja 364.075 orang, yang sudah kerja 358.303 orang (98,4%), berarti yang menganggur hanya 5.772 orang (1,6%). Sebagian besar yang bekerja adalah di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan yaitu 267.283 orang (74,60%). Lihat Tabel I-3).

Sektor yang jumlahnya agak banyak ialah kegiatan jasa kemasyarakatan yaitu 47.495 orang (13,25%) sedang sektor lainnya hanya berkisar antara 0,09 - 3,01% saja. Data tersebut menunjukkan bahwa semua sektor telah ada kegiatannya meskipun hanya sedikit seperti sektor listrik, gas dan air 314 orang (0,09%). Kegiatan tadi diharapkan dapat semakin berkembang, lebih-lebih sesuai dengan sumber alam yang tersedia agar dapat memperluas kesempatan bagi tenaga kerja setempat.

Mengingat sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yang paling dominan, sedang sektor ini merupakan sektor tradisional berarti produktivitas kerjanya masih rendah. Dijelaskan dari data sensus penduduk tahun 1980 bahwa jumlah hari kerja minimum 2 hari dalam seminggu atau sementara tidak bekerja tetapi mempunyai pekerjaan, maka waktu kerja sektor tradisional tersebut pada umumnya tidak penuh. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa sebagian masyarakat masih setengah menganggur karena produktivitas rendah dan waktu kerja kurang penuh, mereka itu masih memerlukan pekerjaan tambahan atau kalau memungkinkan beralih pekerjaan agar mempunyai penghasilan yang cukup. Meskipun jumlah orang yang bekerja cukup tinggi (98%) akan tetapi mereka itu belum bekerja penuh, masih menginginkan pekerjaan lainnya.

Berbicara tentang kependudukan di Propinsi Irian Jaya pada saat sekarang ini, pertama yang ada dipikirkan kita adalah bahwa daerah ini masih sangat jarang penduduknya. Terlebih kalau dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia.

Dari 26 Propinsi di Indonesia kalau diurutkan berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 1961, Propinsi Irian Jaya berada pada urutan yang terakhir, dengan rata-rata tiap kilometer persegi terdapat 2 jiwa. Kemudian setelah Timor Timur bergabung dengan Indonesia maka Irian Jaya menempati urutan ke-27 yaitu berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 kepadatannya adalah rata-rata 3 jiwa tiap kilometer persegi atau sebanyak 1.173.875 jiwa.

Propinsi Irian Jaya dengan 9 Kabupaten dimana hasil sensus penduduk tahun 1980 jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kabupaten Jayawijaya yaitu 257.791 jiwa atau 21,96% dengan luas 47.960 Km2 atau 11,68% dari luas Propinsi Irian Jaya dengan rata-rata kepadatan penduduk per Km2 adalah 5,4 jiwa. Dari 9 Kabupaten tersebut penduduk yang paling padat berdasarkan sensus penduduk 1980 terdapat di Kabupaten Teluk Cendrawasih, dengan jumlah penduduk 71.020 jiwa dengan luasnya 4.010 Km2 atau 0,98% dari luas Propinsi Irian Jaya dengan kepadatan rata-rata per Km2 adalah 17,7 jiwa. Lihat Tabel I-4.

In the meantime, the greater part of the civil employment (267,283 persons or 74.60%) are enganged in the sectors of agriculture, forestry and fishing. See Table I-3.

Tabel / ***Table I — 3***

PROSENTASE PENDUDUK PADA LAPANGAN KERJA UTAMA BERDASARKAN SENSUS TAHUN 1980
PERCENTAGE OF EMPLOYMENT IN IRIAN JAYA ACCORDING TO THE 1980 CENSUS

No	Lapangan Pekerjaan Utama *Industry of Service*	Jumlah / *Total* Orang *Person*	Jumlah / *Total* %	Keterangan *Remarks*
1.	Pertanian, kehutanan, perkebunan, dan kehutanan/ *Agriculture, forestry, and fishing*	267.283	74,60	
2.	Pertambangan dan penggalian/ *Mining and quarrying*	2.962	0,83	
3.	Industri pengolahan/ *Processing industry*	10.388	2,90	
4.	Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	314	0,09	
5.	Bangunan/*Construction*	10.768	3,01	
6.	Perdagangan besar, eceran dan rumah makan/ *Wholesale, retail and restaurant*	7.798	2,18	
7.	Angkutan, perdagangan dan komunikasi/ *Transport and communication*	6.131	1,71	
8.	Keuangan, asuransi, persewaan bangunan, tanah, jasa perusahaan/ *Finance, assurance, leasing, and business services*	3.494	0,97	
9.	Jasa kemasyarakatan/ *Public services*	47.495	13,25	
10.	Lain-lain/*Others*	506	0,14	
11.	Tidak terjawab/*Unclassified*	1.164	0,32	
	Jumlah / *Total*	358.303	100,00	

Sumber : Monografi Irian Jaya, 1984.
Source : *Book of Irian Jaya Monograph in 1984.*

Public services accounted for 13.25% (47,495 persons), electricity, gas and water 0.09% (314 persons) and other sectors 0.09 to 3.01%.

Work productivity in the traditional factors of agriculture, forestry and fishery is in fact still low. According to the 1980 population census the minimum working day during a week was 2 days. Such situation indicates that a number of those working people still require some extra jobs or full-time jobs to meet their daily needs.

Based on population number in 1961, per square kilometre density of the region was the lowest among other provinces in Indonesia, namely 2 heads. While based on the 1980 census, the number of population was 1,178,875 persons, making the region's density 3 heads per square kilometre.

In terms of population distribution (also according to the 1980 census) the greater number of population i.e. 257,791 persons or 21.96% occupied the territory of Jayawijaya District with an area of 47,960 square kilometres or about 11.68% of the Province's total area. It means that the average density per square kilometre of the District was 5.4 heads. In the meantime, the District of Teluk Cendrawasih with its population of 71,020 occupying an area of 4,010 square kilometres or about 0.98% of the Province's total area, accounted for the highest average density 17.7 heads per square kilometre. See Table I-4.

According to statistical data made in 1983 the number of population in Irian Jaya declined to 1,274,634 persons of whom 3,678 men and 554 women were unskilled job seekers.

Tabel / ***Table I — 4***

PENDUDUK, LUAS DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KM2 TAHUN 1980
NUMBER OF POPULATION, EXTENT OF AREA AND AVERAGE DENSITY BY DISTRICT IN IRIAN JAYA 1980

No.	Kabupaten *District*	Penduduk *Population*	% Dari Jumlah Penduduk *Percentage of of population*	Luas Km2 *Area*	% Dari Luas seluruh propinsi *Percentage of total area*	Kepadatan penduduk per Km2 *Average density per square kilometre*
1.	Merauke	172.662	41,71	123 220	30,00	1,4
2.	Jayawijaya	257.791	21,96	47.960	11,68	5,4
3.	Jayapura	151.308	12,89	48.188	11,74	3,1
4.	Paniai	177.619	15,13	46 400	11,30	3,8
5.	Fak-Fak	63.903	5,44	44.566	10,85	3,3
6.	Sorong	134.833	11,49	40.549	9,87	1,4
7.	Manokwari	84.757	7,22	36.773	8,95	2,3
8.	Yapen Waropen	59.982	5,11	18.994	4,63	3,2
9.	Teluk Cenderawasih	71.020	6,05	4.010	0,98	17,7
10.	Irian Jaya	1 173.875	100,00	410.660	100,00	2,8

Sumber : Kantor Sensus & Statistik Propinsi Irian Jaya
Source : *Secretariat of Statistical Bureau, Irian Jaya Province.*

Dan berdasarkan statistik 1983 jumlah penduduk Irian Jaya berkurang menjadi 1.274.634 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk pencari kerja yang belum berpengalaman tercatat sebanyak 3.678 orang Pria dan 554 orang Wanita.

Disamping penduduk asli daerah, juga tercatat penduduk Kewargaan Negara Asing. Mereka itu pada umumnya sebagai tenaga kerja teknis/ahli pada berbagai perusahaan asing dan jasa. Jumlah orang Asing itu sebanyak 1.656 jiwa. Dari jumlah tersebut umumnya mereka berkebangsaan Amerika Serikat, Filipina dan Cina.

Susunan penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin merupakan data yang terpenting dalam hasil pencacahan sensus penduduk tahun 1980, sebab dari data ini dapat dipakai untuk mengistimasi besarnya tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan dimasa lampau.

Jika kita melihat perbandingan susunan penduduk menurut golongan umur berdasarkan hasil olahan sensus 1980 ternyata variasinya berurut yaitu penduduk pada golongan umur 0 - 4 menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk 189.612 jiwa atau 16,15% disusul kemudian oleh golongan umur 5 - 9 yaitu 174.304 jiwa atau 14,85% sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya terdapat pada golongan umur 70 - 74 yaitu 0,2% atau 2.610 jiwa.

Ditinjau dari jenis kelamin maka dari hasil sensus penduduk 1980 jumlah penduduk Irian Jaya 1.173.875 jiwa terdiri dari 612.577 laki-laki dan 561.278 jiwa perempuan. Dengan demikian maka Sex Ratio untuk Nasional (Indonesia) adalah 98,8 Sex Ratio Irian Jaya ternyata lebih tinggi dari propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa yang hanya rata-rata 95. Hal ini berarti bahwa Irian Jaya penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu dari 100 penduduk wanita terdapat 109 laki-laki.

Kemudian berdasarkan perhitungan sex ratio untuk 9 Kabupaten yang ada di Irian Jaya maka Kabupaten Jayapura menduduki urutan tertinggi yaitu 121,4 berarti 121 laki-laki hanya ada 100 perempuan. Hal ini mungkin terjadi karena rata-rata para pencari kerja yang terdiri dari laki-laki mempunyai sasaran di Ibukota Propinsi Irian Jaya. Sebaliknya urutan terendah adalah Kabupaten Yapen Waropen dengan sex ratio 103,6 atau 100 wanita terdapat 103 laki-laki. Lihat Tabel I-5.

Dalam sensus 1980 kepada setiap penduduk ditanyakan nama Propinsi ia dilahirkan serta tempat ia dicacah pada waktu sensus telah dapat dilihat besarnya perpindahan penduduk semasa hidup. Kalau dilihat bahwa penyebaran penduduk menurut tempat tinggal pada waktu itu ternyata dari 1.107.291 jiwa penduduk, diantaranya 1.011.212 jiwa (91,32%) berasal dari Irian Jaya, selebihnya lahir di luar Irian Jaya sebesar 96.079 orang atau 8,68%. Lihat Tabel I-6.

3. Suku Bangsa dan Bahasa

Irian Jaya memiliki jumlah bahasa daerah dan suku bangsa yang terbanyak di negara kita. Menurut perhitungan Barr (1978) di Irian Jaya terdapat 224 bahasa daerah.
Oleh karena itu Irian Jaya mempunyai potensi yang besar sekali untuk memperkaya khasanah kebudayaan nasional Indonesia. Sebaliknya bahasa daerah yang banyak jumlahnya ini merupakan penghalang atau tantangan komunikasi yang kongkrit bagi pemerintah, karena sebagian besar belum ditelaah dan diarahkan demi kelancaran komunikasi dari pemerintah ke masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah dalam rangka penyampaian informasi-informasi yang vital, seperti hal-hal yang menyangkut kebersihan dan kesehatan masyarakat, gizi makanan, pembinaan mental, pertanian, pendidikan dan lain-lain yang perlu diketahui oleh rakyat demi kepentingannya. Sebaliknya pemerintah juga perlu mengetahui keadaan masyarakatnya dalam rangka pembangunan daerah, regional dan nasional.

Tanpa pengetahuan yang mendalam serta pengertian yang baik tentang kebudayaan, termasuk dalam hal ini bahasa daerah suku-suku bangsa yang ada di Irian Jaya maka pelaksanaan pembangunan daerah untuk berbagai bidang, sulit untuk mengetahui bagaimana mempersiapkan orang-orang Indonesia asal Irian Jaya untuk menghadapi modernisasi yang merupakan bagian mutlak dari program pembangunan daerah maupun nasional yang sekarang sedang dan telah dilaksanakan.

Bahasa di Irian Jaya diklasifikasikan dalam dua golongan besar yaitu bahasa Austronesia dan bahasa non Austronesia. Bahasa Austronesia termasuk dalam satu rumpun dengan bahasa kebanyakan terdapat di daerah Indonesia lainnya. Sedangkan bahasa non Austronesia pada umumnya tidak mempunyai hubungan genetik dengan bahasa di luar Irian Jaya dan Papua New Guinea, kecuali dengan beberapa bahasa di daerah Timor, Alor, Pantar dan Halmahera Utara.

Dari 224 bahasa daerah sebagaimana disebutkan tadi, 43 bahasa atau 19,5% terdiri dari bahasa Austronesia. Semua bahasa Austronesia ini terdapat di dekat pantai. Tidak ada satupun yang terdapat di daerah pedalaman. Di lain pihak, bahasa Non Austronesia yang acapkali disebut bahasa Papua, terdapat di mana-mana baik di daerah pantai maupun di daerah pedalaman.

In addition to indigenous people, there were 1,656 foreigners of various nationalities, generally Americans, Filipinoes and Chinese, working as technicians and experts in a number of foreign companies or services.

The age distribution of Irian Jaya based on the 1980 census was roughly as follows : under 4 years accounting for the greatest portion, i.e. about 16.15% or 189,612 toddlers between 5 - 9 accounting for 14.85% or 174,304 children, while those between 70 - 74 accounted for the smallest part, namely 0.2% or 2.610 persons.

Of the total population, there were 612,277 males and 561,278 females, representing a ratio of nearly 109 males to every 100 females, or 98.8 in the national scale sex ratio - higher than that of any other province in Java which was averaging under 95.

In case of sex ratio by district, the District of Jayapura scored the highest figure i.e. 121.4, meaning 121 males to every 100 females. This is perhaps because of job seekers flooding into the capital provincial town of Jayapura consisted mostly of males. In the meantime the District of Yapen Waropen registered 103.6, or 103 males to every 100 females the lowest figure among Irian Jaya's districts. See Table I-5.

Tabel / ***Table I — 5***

PENDUDUK IRIAN JAYA TAHUN 1980 MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS KELAMIN
POPULATION OF IRIAN JAYA IN 1980 BY AGE GROUO AND SEX

Golongan Umur *Age group*	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
0 - 4	100.588	89.024	189.612
5 - 9	93.308	80.996	174.304
10 - 14	75.343	62.371	137.714
15 - 19	60.171	55.013	115.184
20 - 24	54.429	64.666	119.095
25 - 29	53.749	55.048	108.797
30 - 34	46.146	42.882	89.028
35 - 39	36.559	32.907	69.466
40 - 44	29.822	24.892	54.714
45 - 49	23.579	19.213	42.792
50 - 54	17.073	14.626	31.699
55 - 59	9.960	9.011	18.971
60 - 64	5.640	5.266	10.906
65 - 69	3.167	2.768	5.935
70 - 74	1.343	1.267	2.610
75 +	1.720	1.328	3.048
Jumlah - *Total*	612.597	561.278	1.173.875

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya
Source : Statistical Bureau of Regional Secretariat, Irian Jaya Province.

Also, the 1980 census indicated that 1,011,212 out of 1,107,291 persons, or about 91.32%, living in the region were native inhabitants and the remaining 96,079 persons or 8.68% were migrants. See Table I-6.

3. Ethnic Groups and Languages

Irian Jaya Province has the most numerous ethnic groups and languages among provinces in Indonesia. According to Barr's calculation (1978), there are 224 local languages or dialects flourishing here.

Those numerous languages and dialects on one hand may enrich the Indonesian cultural sphere, but on the other this can cause a real problem in dissimenating important information on environmental cleanness, community's health, nutritious foods, mental guidance, agricultural and education matters etc. Which is absolutely important to the community.

In general those languages can be classified into two major groups : Austronesian and non-Austronesian. Included into the austronesian group are languages having lexical and grammatical relationship with languages existing in other parts of Indonesia, while those belonging to the non Austronesian group have not except for some languages in Timor, Alor, Pantar and the northern part of Halmahera.

There are 43 languages in the Austronesian group, which are commonly spoken by the people, mostly migrants, inhabiting coastal areas. The remaining belong to the non Austronesian group, called also the Papua language, which are spoken by indigenous tribes occupying Irian Jaya (and Papua New Guinea) in the coastal and hinterland areas.

In general the people of the region speak three major languages : 1) Malay or Indonesian language; 2) Austronesian and 3) Non-Austronesian languages.

The Malay or Indonesian Language

A dialect of the Indonesian language is also commonly spoken by a number of people inhabiting coastal areas and some towns like Jayapura, Sorong,

Tabel / ***Table I — 6***

PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK PROPINSI IRIAN JAYA DIPERINCI PER KABUPATEN DARI TAHUN 1980 SAMPAI TAHUN 1985
PROJECTION OF IRIAN JAYA POPULATION DURING THE PERIOD 1980 TO 1985 BY DISTRICTS

No.	Kabupaten *District*	Tahun / *Year*					
		1980	1981	1982	1983	1984	1985
1.	Merauke	172.662	174.026	175.401	176.787	178.184	179.592
2.	Jayawijaya	257.791	269.031	280.761	293.002	305.777	319.109
3.	Jayapura	151.308	158.223	165.454	173.015	180.922	189.190
4.	Paniai	177.619	180.230	182.879	185.567	188.295	191.063
5.	Fak-Fak	63.903	65.524	67.182	68.882	70.625	72.412
6.	Sorong	134.833	138.339	141.936	145.626	149.412	153.297
7.	Manokwari	84.757	87.435	90.198	93.048	95.988	99.021
8.	Yapen Waropen	59.982	61.074	62.186	63.318	64.470	65.643
9.	Teluk Cenderawasih	71.020	72.448	73.904	75.389	76.904	78.450
	Jumlah/*Total* 1)	1.173.875	1.206.330	1.239.901	1.274.634	1.310.577	1.347.777
	Propinsi/*Province* 2)	1.173.875	1.205.217	1.237.396	1.270.434	1.304.355	1.339.181

Keterangan
1) Perhitungan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata/tahun masing-masing Kabupaten.
2) Perhitungan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata/tahun 2,67%
Remarks :
1). Estimation based on the yearly average growth rate by district.
2). Estimation based on the yearly average growth rate of 2.67%.
Sumber : *Irian Jaya Dalam Angka 1985*
Source : Book of Irian Jaya in Figures 1985.

Suku-suku bangsa yang berbahasa Non Austronesia merupakan penduduk asli di pulau Irian (Irian Jaya dan Papua New Guinea). Orang-orang yang berbahasa Austronesia berdatangan dalam beberapa gelombang dan menempati daerah-daerah sepanjang pantai sehingga memaksa sebagian orang yang berbahasa Non Austronesia itu pindah ke pedalaman.

Secara garis besar ada tiga golongan bahasa besar, yaitu :
1. Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia.
2. Golongan Bahasa-bahasa Austronesia.
3. Golongan Bahasa-bahasa Non Austronesia.

Golongan Bahasa Melayu/Indonesia

Di bagian pesisir dan sekitar kota-kota terbesar terpakai salah satu logat bahasa Indonesia. Misalnya di Jayapura, Sorong, Merauke dan Tanah Merah. Logat di sini hendaknya diartikan sebagai variasi bahasa lokal tanpa kolotasi yang merendahkan. Pemerintah Kolonial Belanda sejak dahulu terpaksa mempergunakan Bahasa Indonesia dalam surat-surat, dan pengumumannya jika hendak berhubungan dengan daerah yang telah bebas dari isolasi. Ada banyak daerah di Irian Jaya dengan pemakaiannya yang masing-masing berjumlah kecil menimbulkan masalah bahasa pergaulan diantara macam-macam kelompok-kelompok yang terdapat disana.

G J Hold mengadakan penyelidikan diantara tahun 1936-1940 untuk memperoleh gambaran suatu klasifikasi bahasa demi kepentingan penyebaran Zending Kristen. Usaha menghasilkan pendapat bahwa tiada bahasa daerah yang patut dijadikan bahasa pergaulan dan bahasa pengantar. Maka kalangan Gereja secara sadar memilih bahasa Indonesia sebagai lingua franca.

Dengan demikian bahasa Indonesia di kalangan pangreh-praja (pamong praja), Sekolah dan Gereja sudah meresap ke dalam kehidupan masyarakat kota-kota di Irian Jaya. Surat-surat resmi, pengajaran, dan upacara keagamaan orang Irian Jaya yang beragama Kristen, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Disana-sini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional. Bahkan menurut H J Teutscher (1955 halaman 34) ada pula keluarga guru sekolah rakyat dan pegawai rendahan yang terutama memakai bahasa Indonesia, sehingga anak-anaknya tidak mengerti bahasa daerahnya lagi. Pengaruh bahasa Indonesia yang lama kian bertambah.

Dalam berbagai bahasa daerah terdapat kata pinjaman Indonesia untuk menyatakan faham-faham yang berhubungan dengan hal ikhwal kehidupan yang modern. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu memberi jalan ke awal suatu kebudayaan yang baru. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia, politik Belanda di Irian Jaya di lapangan bahasa, bertujuan menggantikan bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Dengan demikian segala ikatan kebudayaan dengan bagian Indonesia yang lain diharapkan bisa menjadi renggang.

Golongan Bahasa-bahasa Austronesia

Di Barat Laut Irian Jaya, yaitu pulau Biak, sebagian Jobi (Yapen) dan di sebelah Timur Teluk Saireri, daerah Sorong serta Teluk Berau Merauke and Tanah Merah.

Even the colonial Dutch Administration during its occupation here was compelled to use the Indonesian language in its correspondence with certain districts or subdistricts or rural administrative levels.

The numerous languages have also posed some difficulties for members of the many kinds of ethnic groups for social intercourse among them. GJ Hold had conducted intense studies to determine a probably suitable language for a medium in spreading the Christianity teaching among those diverse languages and found none. Finally the Church societies chose the Indonesian language as their lingua franca.

Furthermore, through government officials, classes and Churches the Indonesian language penetrated and spread to urban communities in the region. The Indonesian language since then has been also used in official letters, education and the rituals of the Christian Church. According to HJ Teutscher, at that time there were even native families of primary school teachers and lower government officials who spoke the Indonesian language in their daily life, causing their respective children to speak but the Indonesian language, not their tribal dialect.

In the meantime a number of local languages have also adopted certain words reflecting terms of modern life into their vocabulary their vocabulary. As one of uniting agents of Indonesian nationality the Indonesian language has led the community of the region towards a more prospective new cultural sphere. Whereas, after its recognation of sovereignty of the Republic of Indonesia in 1949 the colonial Dutch Government in Irian Java applied a policy designed to change the lingua franca from the Indonesian language to the Dutch language with the purpose of cutting off cultural relationship between the communities of the region and of other regions of Indonesia.

Austronesian Language Group

The language of Austronesia is used by the pople in the Northwest of Irian Jaya namely in Biak Island, a part of Jobi (Yapen), in the East of Sairery bay, Sorong, Berau and Etna bays.

These group of languages originated from the Non Austronesia language which indicates big similarity in both the structure of language and its vocabulary with the language of Austronesia. The language of Austronesia is still influenced by the language of Irian.

Some dialects of Non Austronesia are also found in the hinterland of Irian Jaya. Those dialects are characterised as Non Melanesia and Non Australia.

The language of Austronesia is being studied especially about it's relationship with other dialects in Indonesia. Although Mr. A Capell stated that there is no relationship among the various Non-Austronesia languages in Irian, Halmahera, Timor and Salomon, some similarity characters of those dialects still exist, especially it's dialect structure.

The linguist still can not determine the relationship of respective dialects of the Non-Austronesia and its relationship with other groups of language such as the Australian language. The Waropen dialect was described by GJ. Held as more perfect than other dialects and he has also published the grammer and a list of words of the Waropen dialect.

The dialect which is used by the people of the South Irian Java originated from the Melanesian group of languages. The familiar dialects used by the

sampai Teluk Etna terdapat sejumlah bahasa disebut Austronesia. Golongan ini merupakan hasil perkembangan bahasa-bahasa Non-Austronesia yang mengalami pengaruh dari rumpun ini justru memperlihatkan persamaan yang agak menyolok dengan bahasa-bahasa Austronesia dalam struktur (tata bahasa) dan sedikit dalam perbendaharaan kata-katanya dan masih dipengaruhi oleh ciri-ciri bahasa Irian.

Kata terakhir dari persoalan ini belum terucapkan (J C Anceaux, 1953 halaman 293). Di pedalaman Irian Jaya terdapat juga sejumlah bahasa yang ternyata tidak termasuk rumpun Austronesia; jadi juga tidak termasuk golongan Austronesia. Tentang macam ragam bahasa ini sekarang hanya dapat dikatakan bahwa bahasa itu tidak bersifat Austronesia, tidak bersifat Malanesia dan juga tidak bersifat Australia.

Bahasa Austronesia yang patut diselidiki ialah apakah bahasa itu mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain, seperti tampaknya dalam golongan Nusantara.

A. Capell mengingkari adanya antar hubungan bermacam bahasa Non-Austronesia di Irian, Halmahera, Timor dan Solomon; walaupun demikian pernah diajukan juga suatu ikhtisar ciri-ciri yang bersamaan. Yang jelas sampai sekarang ini bahwa dalam strukturnya ada segi-segi kesamaannya, tetapi dalam perbendaharaan katanya harus dicatat perbedaaan yang besar. Antara golongan bahasa Non-Austronesia dengan golongan bahasa disekitarnya, seperti bahasa Australia, para ahli belum bisa memastikan adanya pertalian bahasa tersebut. Sampai sekarang hanya dapat ditetapkan hubungan antara "tipe bahasa se-daerah", tetapi harus ditambahkan bahwa penentuan pertalian itu lebih-lebih harus ditekankan pada tipe bahasa dan tidak ada daerahnya. Bahasa Waropen oleh seorang ahli yang bernama GJ. Held dilukiskan jauh lebih memuaskan dari bahasa lain. Olehnya diterbitkan suatu tata bahasa, sebuah daftar kata dan teks tentang bahasa Waropen itu.

Bahasa di daerah Selatan yang kini sudah diketahui kelompok khusus dari golongan bahasa Melanesia. Bahasa yang kini sudah diketahui ialah di pulau Yapen sampai pulau Raja Ampat, bahasa Biak, bahasa Waropen di daerah antara Teluk Wandamen sepanjang pantai Saireri sampai desa Sasora di Timur, yang terletak berhadapan dengan pulau Yapen. Kemudian bahasa yang dipakai di ujung Barat pulau Irian dari Sorong kearah Selatan sepanjang pantai Selatan Sele. Termasuk juga golongan Melanesia, bahasa yang kedapatan di daerah yang luas mulai dari Teluk Bentuni, Teluk Mac Cluer, daerah sebelah Timur, kelompok bahasa Kapaur melalui Teluk Arguni dengan tanjungnya sampai daerah pesisir Teluk Etna.

Golongan Bahasa Non-Austronesia

Kelompok-kelompok khusus dari golongan bahasa Non-Austronesia dari hasil penyelidikan sampai sekarang ini terdiri dari tigapuluh satu (31) kelompok.

Corak yang menarik dari bahasa-bahasa di Irian Jaya ialah perbandingan jumlah bahasa-bahasa yang sangat besar dan pemakai yang sangat kecil untuk setiap bangsa, yaitu antara 150 sampai 7000 orang. Hal ini berlaku baik untuk golongan bahasa Austronesia maupun untuk golongan Non-Austronesia.

Tiap ajaran dipakai oleh suatu suku bangsa yang pada umumnya hanya menghuni beberapa desa kecil. Hampir tiap desa lembah dan pulau kecil merupakan kesatuan yang terasing, karena kelainan-kelainan ajaran. Disamping itu kita harus hati-hati juga akan perasaan "Chauvinisme desa" orang Irian untuk melebih-lebihkan perbedaan bahasa itu, sehingga batas logat dalam arti linguistik dan bahasa lebih kabur lagi. Seperti diketahui logat dan bahasa tidak berbeda secara asasi. Dua logat sebuah bahasa dapat berubah sepanjang masa sehingga pemakainya tidak lagi dapat paham memahami.

4. Budaya dan Adat Istiadat

Berdasarkan hasil penelitian dari Wingert, Ralph Linton, Gerbrani dan Koojman, bahwa seni rakyat Irian dibagi menjadi 9 (sembilan) daerah wilayah gaya sni : 4 diantaranya ada di Irian Jaya yaitu : Pantai Barat Laut, yang meliputi seni rakyat di kawasan Teluk Cendrawasih, Kepala Burung Bagian Utara dan Kepulauan Ampat. Teluk Jos Sudarso yang meliputi pantai Utara Jayapura, Sentani dan Tanah Merah Marind - Anim meliputi pantai selatan Merauke; Mimika, Asmat, Awyu, Japai dan Cetuk.

Dalam pembagian wilayah gaya seni tersebut masih terdapat lagi gaya seni lokal yang mempunyai sifat serta ciri yang berbeda-beda; terdiri dari 6 (enam) ragam kesenian yaitu : Daerah Teluk Yos Sudarso dan Pantai Utara, Daerah Sentani, Daerah Teluk Cendrawasih dan Kepala Burung, Daerah Marind - Anim, Daerah Asmat, dan Daerah Mimika. Disamping 6 (enam) ragam kesenian yang berada di daerah pantai, terdapat pula di daerah Pedalaman Pantai dan Jayawijaya, yaitu seni rakyat suku Dani, Ekari, Moni dan lain-lain.

Kesenian rakyat Irian Jaya pada umumnya tumbuh dan berkem-

people of Irian Jaya are among others the Biak dialect, in the islands of Yapen and Raja Ampat, the Waropen dialect used by the people in the region between Teluk Wandeman along the Saireri Coast and the village of Sasora which is located in front of the Yapen Islands. The other generally used dialect is the one used by the people in the extreme west of the Island of Irian to the south of Sorong along the south coast of Sale.

The Melanesia dialect is used by the people in the large region, namely from the Bentuni and Mas Cluer bay in the eastern region of Irian Jaya to the coastal area of Etna bay.

Non-Austronesian Language Group.

Based on a research of Non-Austronesian languages, up to the present there are 31 special groups of dialect of Non-Austronesia.

The specific and interesting thing in the dialects of Irian Jaya is that the number of dialects is far more than the users, namely about 150 to 7,000 people for one dialect both the Austronesian and Non-Austronesian dialects.

Sub ethnics in Irian Jaya usually live in small villages and the respective sub ethnics are isolated from each other owing to the different dialects.

4. Culture and Traditional Customs

Based on research conducted by Wingert, Ralph Linton, Gerorani and Koojman, the folk art of the Irianese are grouped into 9 art regions of which four are practiced in Irian Jaya, namely : the Northwest Coast which covers the folk art of Cendrawasih Bay, Northern Kepala Burung and Kepulauan Ampat; the folk art of Teluk Sudarso covering the North Coast of Jayapura, Sentani and Tanah Merah, Marind - Anim covering the south coast of Merauke, and that of Mimika, Asmat, Awyu, Japai and Cetuk.

In the said art region grouping, there are still six kinds which have different character from each other, namely those applied in the region of Teluk Yos Sudarso and the North Coast, the region of Sentani, the region of Teluk Cendrawasih and Kepala Burung, the region of Marind-Anim, region of Asmat and region of Mimika. Besides the six local arts mentioned above which are practised in the coastal area, there are other traditional arts in the hinterland and in Jayawijaya, namely those of the Dani, Ekari and Roni tribes.

The development of the art of Irian Jaya in general is in accordance with their custom and culture. Besides for entertaining, the art activities of Irian Jaya has also the function of strengthening the awareness of commonness among the people, stimulating the spirit of working and fighting. Art activities are also considered as a power to promote social order.

The traditional dances of Irian Jaya in general is considered sacred which can be performed only in special occassions, not in just any place and time. Those dances are considered as the expression of the soul of men which is dominated by its specific purposes, so that the creation of dances emphasises more to the purpose of the dance than to it's style.

The development of Irian Jaya dances at present is market by the existence of new creations of non sacred dances which express happiness and frienship for instance, the dance of Mapia from the island of Mapia near Biak and the dance of Yosim which is very popular among the young people of the town.

Although the culture of the region in Irian Jaya differ from each other, the differences are not very obvious. Theu have the same music instruments such as the drum or "tifa", bamboo and shell trumpet - which are used by all ethnics in Irian Jaya. These kinds of music instruments are considered sacred instruments by the people in the hinterland of Irian Jaya, so that they can only can be played on special ceremony.

Beside the three music instruments mentioned above, there is the music instrument in the form of Gong which is usually played by the people in Biak and Waropen. The other music instrument is called "Konki", a trumpet which is made of wood and the tong-tong are usually played by the people of Muyu. A kind of guitar instrument which is made of bamboo and shells is usually played by the people of Teluk Yos Sudarso. The "Kaido", a blow music instrument in the form of a fork is usually played by the people of Ekari.

According to it's function, the Irian Jaya dance can be devided into three groups, namely, the ceremonial dance, the friendship or happy dance and the performing dance. The ceremonial dance consists of ritual dance, the dance of hope and thanks giving dance. The ritual dances consist of the dance which is performed on the day of the birth of a child; a wedding day, the demise of a tribe member, or celebrating the special day when a young men is considered as an adult. While the dance of hope consist of dances performed to worship the soul of ancestors, war dance, animal dance and the dance for the purpose to heal an ailing person. The thanksgiving dance is performed at harvest time and usually ended with a pig party. This dance is also performed after winning a battle or after a hard day's work.

The art of singing of the people of Irian Jaya is considered as the reflection of conscience which is expressed through the voice and rhythm. The function

bang sejalan dengan adat istiadat serta peradaban mereka. Kelangsungan kegiatan seni pada umumnya disamping hiburan, juga berfungsi sebagai unsur pemerkuat homoginitas, mempertebal keyakinan dan menegakkan semangat kerja, perang dan lain-lain.

Bahkan pada saat tertentu berfungsi pula sebagai suatu kekuatan penata dan penertib warga masyarakat dalam hubungannya dengan adat dan istiadat serta kebudayaan. Dapat disini dikemukaan tari-tarian dan kesenian yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut : Tarian Irian Jaya pada umumnya merupakan tarian upacara yang dianggap keramat dan tidak boleh ditarikan di sembarang tempat dan waktu. Tari-tarian Irian Jaya merupakan ekspresi jiwa manusia yang didominir oleh kehendak untuk tujuan-tujuan tertentu bukan untuk ditonton. Dengan demikian dalam menggarap tari lebih mementingkan tujuan dari pada bentuk.

Dalam perkembangan kemajuan sekarang di sana-sini timbul tari-tarian bersifat sekunder yang lebih merupakan garapan khusus untuk ditonton, atau ungkapan kegembiraan dan pergaulan. Sebagai contoh dapat dikemukan dari Mapia yang berasal dari pulau Mapia dekat Biak, dari tari Yosim yang digemari oleh muda-mudi yang tinggal di kota.

Walaupun terdapat perbedaan antara kebudayaan daerah di Irian Jaya, namun dalam seni tari dan musik kiranya perbedaan tersebut tidak begitu menyolok. Hal ini dapat dilihat dari instrumen-instrumen musik yang dipakai sebagai iringan tari-tarian. Alat-alat musik yang pada umumnya dipakai oleh setiap suku adalah gendang/tifa, terompet bambu dan terompet kulit kerang. Bagi masyarakat di pedalaman ketiga instrumen musik tersebut dianggap suci dan hanya boleh dimainkan pada saat ada upacara saja.

Disamping ketiga instrumen tersebut masih dijumpai pula instrumen-instrumen musik yang berbentuk gong, seperti yang terdapat pada orang-orang di Biak dan Waropen. Konki atau terompet dari kayu dan tong-tong dimiliki oleh Muyu, alat-alat petik dari bambu serta creng-creng dari kulit kerang dimiliki oleh orang-orang Teluk Yos Sudarso. Masih terdapat lagi alat yang disebut Kaido di daerah Ekari yaitu semacam garpu bergigi tiga dari bambu yang ditempelkan pada mulut.

Menurut fungsinya tari-tarian Irian Jaya dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu tarian upacara, tari-tarian gembira atau pergaulan dan tari-tarian tontonan. Tari upacara masih dapat dibagi lagi menjadi tari-tarian ritus, tari-tarian harapan dan tari-tarian terima kasih. Tarian upacara ritus meliputi tari untuk kelahiran kedewasaan anak-anak, perkawinan dan kematian. Sedangkan tarian harapan ialah tari untuk menyembah kepada arwah nenek moyang, tari perang, tari binatang dan tari untuk penyembuhan orang sakit. Begitu pula tarian terima kasih dilakukan sewaktu panen, dan ini akan diakhiri dengan pesta babi, juga tarian ini diselenggarakan setelah menang perang atau setelah selesai mengerjakan pekerjaan yang berat.

Seni suara di Irian Jaya diungkapkan sebagai ekspresi hati nurani yang diekspresikan lewat suara dengan unsur-unsur irama yang dihayati, dipelihara dan dikembangkan. Fungsi kegunaan seni suara di Irian Jaya antara lain adalah sebagai berikut : sebagai unsur penunjang, sebagai sarana penerus kelangsungan tradisi, media pembakar semangat, media penyalur kritik dan nasehat, unsur daya tarik simpatisi dan partisipasi dan sebagai sumber hiburan yang sehat.

Alat-alat penunjang kehidupan seni suara di Irian Jaya terdiri dari dua bagian, yaitu : musik vokal, berupa seni suara maupun methode-methode menyanyi bersama baik secara Motet, Kanon, dan Madregal (paduan suara).

Musik instrumental, berupa tifa, seruling bambu dan bambu dengan ujungnya dibelah dua. Alat pikon ini digunakan oleh suku Dani, daerah Jayapura, Paniai, suku Moni dan Ekari. Selain alat-alat tersebut diatas, masih dapat dijumpai terompet bambu di daerah Asmat dan Mimika, begitu juga terompet kulit kerang. Alat ini digunakan tanda berkumpul ataupun tanda bahaya.

Seni rupa di Irian Jaya dapat digolongkan kedalam beberapa bagian antara lain : seni bangunan, seni patung, seni ukir dan seni lukis. Pada umumnya merupakan bangunan rumah yang dipergunakan untuk tinggal dengan bentuk dan namanyapun bermacam-macam misalnya di Wamena dinamakan Pilomo/honai, di Asmat dinamakan New (rumah laki-laki), Karawari di Biak, Kombo di Sentani, Karapao di Mimika dan Rumah Sema di Waropen. Seni patung di Irian Jaya sejalan dengan kepercayaan yang dianut. Pemujaan terhadap arwah nenek moyang divisualisasikan, dengan menciptakan patung-patung perwujudan dari kayu. Misalnya di Asmat, dikenal 2 (dua) jenis patung arwah yang berukuran besar dinamakan mbis, sedangkan yang berukuran kecil dinamakan kawenak.

Seni ukir di Irian Jaya banyak diterapkan pada benda-benda yang dipakai sehari-hari, misalnya pada dayung, piring kayu, panah, tombak dan lain-lain yang berfungsi sebagai hiasan, juga sebagai simbol untuk mengundang kekuatan-kekuatan tertentu apabila dibutuhkan.

of the art of singing in Irian Jaya is among others as a means to foster the continuation of tradition, a medium of promoting the fighting spirit, a medium of channelling criticism and advice, to attract sympathy and participation and as a means of entertainment.

The fine arts in Irian Jaya can be grouped as follows : architecture, sculpture, carving and painting. Generally the house of Irian Jaya has various names such as "Pilomo" or "Honai" in Wamena, "Yew" (the house of men) in Asmat, "Karawari" in Biak, "Kombo" in Sentani, "Karapao" in Mimika and "Sema" in Waropen. The development of sculpture in Irian Jaya is in accordance with the belief of the people. The worship of soul of ancestors is visualised through the wood sculpture. For instance, the people of Asmat has two sculpture of ancestors, namely the big one called "mbis" and the small one called "kawenak".

The art of carving in Irian Jaya is usually applied to the daily goods such as the oar, wooden plate, arrow, spear and others which function as adornment and symbol for a medium to call a specific magic power when necessary. The Irian Jaya people consider the carved goods as an expression of beauty, symbol of the presence of their ancestors, symbol of strength and sense of responsibility, and also the symbol of fertility. The carved goods with designs of men, animals, plants, fish and others are usually placed in front of doors, in the house or and even in the yards.

The function of painting art in Irian Jaya is not too different from the art of sculpture which is directed to worship the soul of ancestors. The oldest painting in Irian Jaya which originated from the period of the prehistoric times can be found in the caves of Kaimana and Teluk Berau in the district of Fak-Fak.

The Custom Law

The land law in Irian Jaya can not be separated from the land titles (hak ulayat) of the inhabitants of the village. The "hak ulayat" in Irian Jaya is the right of an ethnic group, one village or an association of villages on a certain piece of land with it's contents.

In the daily life of the traditional society of Irian Jaya, the global function of the land is as follows :

a. to meet the physical needs
b. to meet the religious needs

The people of the sub district of Kemtuk Gresi in the district of Jayapura, traditionally belief that the land they have originated from their ancestors, who gave it to the customary association called "Wai Iram".

Every association has members of custom law association and the custom law association has a piece of land in a certain region so that there is always a land title for a specific association. All the land belonging to the custom law association in the sub district of Demta in Jayapura district constitutes custom land. Both the perennial and annual crops such as sago, areca nut, manggo, orange, banana, taro, flowers and others are planted in a way to function as borderline of the custom land. Sometimes these borderlines became obscure because the plants are not permanent substances. Other divisions have natural borderlines such as mountains or rivers which makes permanent boundaries.

5. Public Administration

(a) Historical Background

The history of Irian Jaya began in the VIIth century. In the said century the merchant from Sriwijaya (South Sumatra), went to Irian Jaya and declared Irian Jaya as a territory of the Kingdom of Sriwijaya which at that time was called "Janggi". This was accepted as logical because the Kingdom of Sriwijaya at that time constitutes the centre of both trade and Budhism which had an established relation with China and India. With a strong fleet the merchants from Sriwijaya sailed to the Moluccas and Irian Jaya to trade in spices, perfume, pearl and bird feathers of Cendrawasih.

The year book of China stated that the King of Sriwijaya, Maharaja Sri Indrawarman sent a delegation to the emperor of China to offer the beautiful bird feathers. In the mean time, a Chinese traveller, Chon You Kwa wrote down that in the Indonesian Archipelago, there is a region called "Tungki", a part of the Moluccas. When the name of "Tungki" was used to denote "Janggi", it confirms the notes about the relationship between Irian Jaya and the Kingdom of Sriwijaya.

Mpu Prapanca stated in his book of Negarakertagama (1865) that Irian Jaya was a part of Majapahit. In the 14th poem of the said book, Mpu Prapanca used the word of Ewanin which, according to linguists, is the other word of Onim and Sian is the other word of Kowiai both of which are located in Teluk Bintuni or at present known as the district of Manokwari.

Since the past time, ethnics of Irian Jaya has had a relationship with other ethnics in the empire of the Moluccas, the region west of Irian Jaya. In the 15th century all the north coastal area of Irian Jaya to the border of PNG - Irian Jaya and West Coast of Irian Jaya to Namota in the South of Irian Jaya and it's surounding islands belonged to the territory of Sultan Tidore.

Ukiran bagi masyarakat Irian Jaya mempunyai arti dan pengaruh sebagai berikut : Merupakan lambang kehadiran nenek moyang, lambang kekuatan hidup, rasa tanggung jawab balasam, lambang kesuburan, ungkapan keindahan dan kenangan. Biasanya ukiran ditempatkan di depan pintu rumah, didalam rumah, di kebun, di dusun dan tempat lainnya dengan motif berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, ikan dan lain-lain.

Seni lukis di Irian Jaya tidak jauh berbeda dengan fungsi dari seni patung, seni lukis dan lain-lain semuanya didasari oleh kepercayaan serta pemujaan roh nenek moyang dan lain-lain. Seni lukis yang tertua di Irian Jaya dijumpai di gua-gua Kaimana dan Teluk Berau Kabupaten Fak-Fak, yang diperkirakan berasal dari zaman pra sejarah.

Hukum Adat

Dalam memberikan gambaran secara umum tentang hukum tanah di Irian Jaya, maka hal ini tidak terlepas dari masalah hak ulayat, dalam hal kewenangan dari warga persekutuan hukum untuk menguasai atas tanah dimana warge persekutuan hukum tersebut berada.

Yang dimaksudkan dengan hak ulayat, hak yang dimiliki oleh suatu suku (stam), sebuah serekat desa-desa (dorpembond) atau biasanya oleh suatu desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya.

Didalam tata kehidupan sehari-hari pada masyarakat tradisional Irian Jaya, terlihat adanya persekutuan hukum adat dimana hubungan hukum antara tanah dengan manusia secara garis besarnya dapatlah dikemukakan sebagai berikut :

(a) berupa fungsi tanah dalam hubungannya guna pemenuhan kebutuhan jasmani;
(b) berupa fungsi tanah dalam hubungannya guna pemenuhan kebutuhan rohani, atau dapat dikatakan dengan perkataan lain, bahwa fungsi tanah sifatnya adalah guna pemenuhan kebutuhan religius.

Dapat dikemukakan sebagai contoh kepercayaan tradisional yang demikian ini di daerah Genyem Kecamatan Kemtuk Gresi Kabupaten Dati II Jayapura yang mempunyai kepercayaan tradisional, bahwa tanah itu berasal dari leluhur yang telah mengkurniakan kepada persekutuan hukum yang dikenal dengan nama Wai Iram.

Pada setiap persekutuan hukum mempunyai warga sebagai anggota dari persekutuan hukum adat yang bersangkutan, begitu pula setiap persekutuan hukum adat menguasai sutu wilayah tertentu, masing-masing secara ulayat atas sebidang tanah. Sehingga hal demikian ini menimbulkan adanya batasan-batasan berlakunya hak ulayat atas sebidang tanah beserta isinya bagi setiap warga persekutuan hukum tersebut. Berkenaan dengan penguasaan tanah secara ulayat di daerah Tanah Merah kecamatan Demta Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura, tanah-tanah yang dikuasai persekutuan hukum adat adalah tanah-tanah yang digarap dan tanah yang belum digarap, semua bidang tanah tersebut adalah menjadi tanah adat. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh batas tanah adat itu, maka diadakan batas-batas dengan tanda-tanda berupa pohon/tanaman jangka panjang seperti sagu, pinang, mangga, jeruk, pohon besar dan sebagainya. Kadang-kadang ada pula untuk tanda-tanda tersebut ditanami tanaman jangka pendek seperti pisang, keladi, bunga-bungaan (suring) dan sebagaiya. Oleh karena tanda-tanda tersebut bukan merupakan hal yang permanen maka sering terjadi kekaburan. Sedangkan di daerah lain diketemukan tanda-tanda batas adalah terdiri dari gunung-gunung, sungai-sungai atau pohon-pohon besar yang kesemuanya adalah sangat sulit untuk dapat diketahui dengan pasti karena tidak pernah diukur dan tanda-tanda tersebut bersifat alami sehingga setiap saat dapat berubah dengan mudah.

5. Pemerintahan

a. Latar Belakang Sejarah

Catatan sejarah yang ada tentang Irian Jaya dimulai pada abad ke VII. Pada abad ke VII diberitakan bahwa para pedagang Sriwijaya telah sampai di daerah ini dan menyatakan bahwa Irian Jaya termasuk Wilayah Kerajaan Sriwijaya yang mereka beri nama JANGGI. Keterangan tersebut dapat dipahami mengingat pada waktu itu Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perdagangan dan pusat agama Budha yang berhubungan dengan bangsa Cina dan India. Dengan armadanya yang kuat Sriwijaya mengunjungi Maluku dan Irian Jaya untuk memperdagangkan rempah-rempah, wangi-wangian, mutiara dan bulu-bulu burung Cendrawasih. Buku tahunan Cina menyebutkkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Maharaja Sri Indrawarman telah mengirimkan utusannya ke Kaisar Cina dan mempersembahkan bulu-bulu burung yang indah. Sementara itu seorang musafir Cina Chon You Kwa menulis bahwa dikepulauan Indonesia sekarang terdapat suatu

Antoni D Anease and Fransisco Sorreano, sailors from Portugal, were the first men who went to the north coast of Irian Jaya when they sailed in 1511 to look for spieces but they did not anchor in that place. Don Jorge De Nenezes, the Portugal sailor was the first Western man who anchored in the north coast of Irian Jaya and he gave the name of Papua to the island. The word of Papua originated from the language of the ancient Malay, namely, "Papuwah" meaning "the men wiht the curly hair".

Inigo Ortis de Retes was the first man who gave the name of New Guinea to the Island of Irian Jaya when he anchored at the mouth of the river of Membramo in the north coast of Irian. He gave the name "New Guinea" because the people of Irian. He gave the name of "New guinea" because the people of Irian looks like the people on the coast of West Africa. The name given by Retes first appeared on the map which was publish in the 16th century in Latin as "Nueva Guinea" and "Nova Guinea" and in the Dutch language as "Nieuw Guinea" or "Nieuw Guinee". In history books the words "papua" and "guinea" are joined together and became "New Guinea".

The name of Irian was suggested by Frans Kaisiepo in the conference of Malino in 1946 and this name was further adopted by the Indonesian people up to the present.

Of among the very strong nations of European the Dutch succeeded to dominate Irian Jaya and made it part of its colony. With it's strong monopoly system of trade, the VOC chased away the other Europeans from Irian.

Efforts of the Dutch to seize Irian Jaya was first shown by the construction of the "Fort de Bus" fortress in Teluk Triton at the foot of Lumenciri mountain. At the time, the commissioner of the Netherlands government, AJ Van Delden made a statement that the region of Nieuw Guinea with it's hinterland starting from 141° east longitude in the south coast to West, Southwest and North until to peninsula of Goede Hoop in the North coast, except the region of Mansari, Karondefer, Ambarpura, Amberoom (the territory of Sultan Tidore) became part of the region belonging to the Dutch Government.

Although since 1828 West Irian was considered as the colony of the Dutch, in reality the colonisation only started at the end of the 19th century. In the beginning the Dutch ignared Irian Jaya because they concider the region as being not beneficial. But when threats of competitions turned up from American and other European countries to expand their colonies, the Dutch started to pay attention to West Irian. The main threat felt by the Dutch came from the Britain and Germany when the two countries started to expand their colonies to East Irian.

The oppression by the colonialist in Irian -- like in other regions in Indonesia -- caused resistance movements which based on Indonesia's history began in the 19th century to continue until the time the Dutch colonialists left Irian Jaya. The opposition movements led by traditional leaders spontaneuosly appeared as reaction against the colonialist. In the beginning these movements were not well organised, only after 1945 they were sponsored by political organisations.

In 1930 led by the prince Nuku of Tidore the people attacked te fortress of "Fort de Bus", the first centre of public administration of the Dutch in Irian Jaya. It was one of the reasons why the Dutch left the fortress of "Fort de Bus".

During the period of 1930 - 1942, series of attacks by the people inspired by a spiritual movement of Cargo Cults, occured in the whole area of Irian.

According to documents of FC Kamma the spiritual movement of Cargo Cults, occured in the whole area of Irian. According to documents of FC Kamma the spiritual movement of Cargo consisted of Reni Movement in the island of Raja Ampat led by Wasyari Faidan (1931). Konon movement in the island of Waigeo led by Taula (1933); Warbesren Movement in Batduta led by warbesren (1933); Nyawomos movement in Pam (1941); Koneri movement in Insubaki led by Angganita Menufaur (1938); Sen movement in Kayu Ijau (1935); Manggarega movement in Teluk Arguni (1935); Damo movement in Gressi (1935) and Simson movement in Jayapura (1940-1943).

In the same period, the people of Kokas led by Raja Mahmud Rumagesang Al Alam rebelled against the Dutch. This rebellion happened when the Dutch forced Raja Mahmud Rumagesang to hand them the amount of money which he got from the oil company in his territory. Raja Mahmud Rumagesang refused to do it because the money had been evenly shared among the people. For his inovedience to the Dutch he was arrested and exiled in Hollandia.

The people's movement against the Japanese occupation began in 1943 coinciding with the attack of Mc Arthur against Japan in Irian Jaya. The patriots leading the people rebellion were among others Silas Papare, Samuel Kawab, Martin Inder, Raja Fatagar, Raja Kokas and Lodewijk Mandacan.

News about the proclamation of independence of Indonesia was widely spread in Irian Jaya through the radio of the allied forces and newspapers from Australia. This news aroused the fighting spirit of the people of West Irian, but they waited for their political leader to lead and organise the rebellion. After Mc Arthur liberated Irian from Japan, he handed the authority on Irian

daerah yang bernama Tungki dan merupakan bagian dari Maluku. Kalau nama Tungki itu dipakai untuk menyebut nama Janggi maka hal tersebut memperkuat keterangan tentang adanya hubungan Irian Jaya dengan Kerajaan Sriwijaya.

Didalam Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca (1365) Irian Jaya adalah termasuk Wilayah Majapahit atau Majapahit kedelapan. Didalam syair ke XIV didapati kata-kata Ewanin yang menurut beberapa sarjana bahasa merupakan sebutan untuk Onim, sedang Sian untuk Kowiai yang kedua-duanya terletak di Teluk Bintuni yang sekarang daerah Kabupaten Manokwari.

Suku-suku bangsa di Irian Jaya sudah sejak dulu mempunyai hubungan dengan suku-suku bangsa di bagian Barat yaitu Kerajaan di Maluku. Pada abad Ke XV seluruh Pantai Utara Irian Jaya sampai perbatasan dengan PNG-Irian Jaya dan pantai Barat sampai Namatota di sebelah Selatan serta pulau di sekitarnya menjadi daerah kekuasaan Sultan Tidore.

Bangsa Barat yang mula-mula melihat pantai Utara Irian adalah dua orang pelaut Portugis Antonio D. Anease dan Fransisco Sorreano pada tahun 1511, dalam pelayarannya mencari rempah-rempah, mereka tidak mendarat di pantai itu. Don Jorge De Menezes seorang pelaut Portugis merupakan orang Barat pertama yang mendarat, dia menamakan pulau dengan Papua. Kata Papua berasal dari bahasa Melayu Kuno "Papuwah" yang berarti "Orang berambut keriting".

Orang yang pertama memberi nama New Guinea pada pulau Irian adalah Ynigo Ortis de Retes ketika ia berlabuh dimuara Sungai Membramo di pantai Utara Irian. Ynigo Ortis de Retes menamakannya dengan "Nueva Guinea" karena melihat penduduknya berkulit hitam seperti penduduk pantai Afrika Barat. Sebutan yang diberikan oleh De Retes tersebut ditulis dalam peta abad ke XVI dalam bentuk Latin yaitu "Nova Guinea" dan dalam peta Belanda "Nieuw Guinea" atau "Nieuw Guinee". Dalam catatan sejarah penamaan Papua dan New Guinea biasa dipakai bersama-sama.

Nama Irian diusulkan oleh Frans Kaisiepo dalam Konfrensi Malino pada tahun 1946 dan nama ini kemudian dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang.

Diantara sekian banyak bangsa-bangsa yang pernah datang ke Irian Jaya, bangsa Belandalah yang kemudian berhasil menguasainya. Dengan kedudukannya yang kuat serta sistem monopolinya di Indonesia, VOC kemudian berhasil mengusir orang-orang Eropa lainnya dari Irian.

Usaha Belanda untuk menguasai wilayah Irian Barat pertama kali kelihatan ketika diresmikannya pendirian benteng "Fort de Bus" di Teluk Triton di kaki Gunung Lumenciri.
Pada kesempatan ini Komisaris Pemerintah Belanda AJ Van Delden membacakan suatu pernyataan bahwa daerah Nieuw Guinea dengan daerah pedalamannya dimulai pada garis 141° BT di pantai Selatan terus ke arah Barat, Barat Daya dan Utara sampai ke semenanjung Goode Hoop di pantai Utara kecuali daerah Mansari, Karondefer, Ambarpura dan Amberoom yang dimiliki Sultan Tidore dinyatakan milik Belanda.

Sekalipun sejak tahun 1828 Irian Barat sudah dianggap sebagai daerah jajahan Belanda, namun kekuasaan yang sesungguhnya baru terwujud pada akhir abad ke XIX. Semula Belanda mengabaikan daerah ini karena dianggap kurang menguntungkan. Tetapi setelah timbul ancaman serta saingan-saingan dari orang-orang Amerika serta orang Eropa lainnya dalam usaha memperluas daerah jajahannya masing-masing mulailah Belanda memusatkan perhatiannya kepada daerah Irian Barat. Disamping itu ancaman yang terutama dirasakan oleh Belanda dari Inggris dan Jerman yang telah mengembangkan kekuasaan mereka di Irian Timur.

Penindasan yang dilakukan penjajah di Irian seperti juga daerah-daerah lain Indonesia menimbulkan gerakan perlawanan ini berdasarkan catatan sejarah dimulai pada abad ke XIX dan berlanjut sampai Belanda meninggalkan Irian. Pada awalnya gerakan-gerakan perlawanan ini belum terorganisasi hanya berupa gerakan spontan masyarakat karena ketidakpuasan terhadap tindakan-tindakan penjajah, dipimpin oleh pemimpin tradisional. Baru sesudah tahun 1945 ada gerakan perlawanan digerakkan organisasi politik.

Pada tahun 1930 terjadi perlawanan rakyat Raja Ampat yang dipimpin seorang Pangeran Tidore yang bernama Nuku. Pada periode ini pula terjadi penyerapan-penyerapan rakyat terhadap Fort de Bus yang merupakan pusat kekuasaan Belanda yang pertama di Irian. Penyerangan-penyerangan ini merupakan salah satu sebab bagi Belanda untuk meninggalkan benteng ini.

Pada periode ini terjadi peralawanan rakyat yang merupakan gerakan spontan dibawah pimpinan tradisional, yang disebabkan penindasan yang dilakukan penjajah. Dalam periode 1930 - 1942, terjadi serangkaian gerakan perlawanan rakyat, tersebar di seluruh Irian yang dilhami oleh gerakan kebatinan berupa Cargo cults.

to the Dutch soldiers of Nica which planned to return Irian to the colony of the Dutch.

The resistance movement against the Dutch began in Jayapura organised by Sugoro who was an Indonesian patriot and ex Digul convict together with the other local defenders such as Silas Papare and Martin Indey. In the mean time, on August 31, 1945, an incident occured in Hollandia when the people refused to hoist the Dutch flag in commemoration to the birthday of Queen Wilhelmina but hoisted the American and Indonesian flags instead with the Dutch flag at half mast. This incident caused the Dutch colonials to arrest the movement leaders and prohibited the hoisting of the Indonesian flag. Nevertheless, the movement against the Dutch was spreading, the name Irian replacing "Nederlandsche Nieuw Guinea" became more popular among the local people. The leader of guerillas such as Silas Papare, M Indey, Dumkorem and others were arrested when they plan to launch an attack on December 25, 1945. While in jail, Sugoro, Silas Papare and Martin Indey again planned to rebel against the Dutch, but it failed. Silas Papare was exiled to Serui and there he met with other rebel leader such as DR Sam Ratulangi, Dr Gerungan, L Tobing. That is why Serui became the centre of rebellion movement against the colonialists in Irian.

The more organised resistance movement began since the proclamation of Indonesia's independence on August, 17, 1945. The first political organis tion was established in Hollandia Binnen (Abe) with the name of "Komite Indonesia Merdeka" (Independent Indonesia Committee), "Partai Indonesia Merdeka" (Independent Indonesia Party) in Biak and in 1946 "Partai Kemerdekaan Indonesia Irian" (Indonesian Independence Party in Irian Jaya) was established in Serui led by Silas Papare. In 1945 Sangaji Mulan and Samual Kawab established the movement of "Merah Putih" (Red and White) in Manokwari which spreaded to Babo, Kokas, Fak-Fak and Sorong. In the mean time Muhamad Ahmad led "Badan Perjoangan Indonesia" (Indonesian Struggle Body) in Sorong and Raja Ampat.

The political parties movements sometimes was in the form of armed movement, such as what happened in Biak, Manokwari, Fak-Fak, Merauke and Tanah Merah. The armed intervention in this period were among others :

- *The guerilla war in the region of Kepala Burung led by Lodewijk Mandacan.*
- *The guerilla war in Teluk Bintuni led by Samuel Kawab.*
- *The rebellion by the people of Kokas against the Dutch, it started When the people lowered the flag of the Dutch. The Dutch soldiers were defeted by the people, so that the Dutch ask for military assistance from Sorong. At last the King of Kokas, A Rumagesang was arrested and brought to Sorong. For his stubborn fighting against the colonialist, Rumagesang was exiled in Manokwari and sent again to Hollandia and at last to Nusakambangan in Central Java. Only in 1950 he was released by the Indonesian government. An other resistance movement by the local people in Biak was led by Stefanus Josef. His plan to rebel was foiled by the Dutch and he was arrested in Hollandia and punished for life imprisonment in the Jail of Cipinang and in 1950 he was again released by the government of Indonesia. Other leaders of rebels such as Terianus Simbiak, Hanoch Rumbrar, Marcus Wattimena were exiled to Digul while Petro was shot death.*

In the field of diplomacy in this period negotiations were conducted in the conference of Melino in 1945. Frans Kasiepo is one of the representatives from Irian Jaya to the conference which resulted among others :

(1) To change the name of Papua into Irian
(2) To release Sugoro from jail
(3) To promote Irian to an Autonomous Residency (an Indonesian administrative unit).

The transfer of Indonesia's sovereignty as the result of the Round Table Conference of December 30, 1949, did not include Irian Jaya.

The Indonesian government undertook various diplomacy steps with the Dutch to transfer Irian Jaya to the Republic of Indonesia. Because of the stubbornness of the Dutch in keeping Irian Jaya in its power, Indonesia used force to establish the transition of this province of West Irian in 1956 with it's capital of Soasiu. The Indonesian government established a radio station in Soasiu for the people's movement. This action was followed by a guerilla war of Obano in 1956. In order to win this war, the Dutch mobilised the marines and police from Biak to Enarobi. The Dutch oppressed the people and about 100 people become the victims. About 700 people were killed when in the same year the Asmat battled against the Dutch.

Owing to failure in diplomacy efforts, the President of Indonesia (Commander in chief of its Armed Force) on December 19, 1961 stated the "Trikora" or "the three demands of the people" which demanded :

(1) to foild the establishment of the Papua State of the Dutch
(2) to hoist the national flag of Red and White in West Irian
(3) to prepare a mobilisation to struggle for the independence and unity of the nation.

Berdasarkan catatan FC Kamma, gerakan cargo tersebut adalah : Gerakan Reni di Kepulauan Raja Ampat dipimpin Wasyari Faidan (1931); Gerakan konon dipulau Waigeo dipimpin Taula (1932); Gerakan Warbesren dipimpin Warbesren di Batduta (1933); Gerakan Nyawomos di Pam (1941); Gerakan Koneri dipimpin Angganita Menufaur di Insubaki (1938); Gerakan Sen di Kayu Ijau (1935); Gerakan Manggarega di Teluk Arguni (1935); Gerakan Damo di Gressi (1935) dan Gerakan Simson di Jayapura (1940-1943).

Pemerintah Kolonial Belanda tidak membiarkan geerakan-gerakan ini pada umumnya melakukan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin gerakan dan anggota-anggotanya.

Dalam periode ini pula, terjadi gerakan perlawanan rakyat Kokas dibawah pimpinan Raja Mahmud Rumagesang Al Alam, terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan ini disebabkan karena Belanda memaksa Mahmud Rumagesang unuk menyerahkan uang yang diterimanya dari maskapai tambang minyak yang beroperasi di daerahnya. Paksaan ini ditolak karena uang itu sudah dibagikan secara adil kepada rakyat sebagai hasil jerih payah menolong maskapai minyak. Raja Rumagesang ditangkap dan diasingkan ke Hollandia.

Gerakan rakyat melawan penjajah Jepang dimulai pada tahun 1943 bersamaan dengan gerakan Mac Arthur menyerang pertahanan Jepang di Irian. Pejuang-pejuang yang memimpin perlawanan ini antara lain Silas Papare, Samuel Kawab, Martin Indei, Raja Fatagar, Raja Kokas, Lodewik Mandacan.

Berita tentang proklamasi tersebar luas di Irian melalui radio sekutu maupun koran dari Australia. Berita ini membangkitkan semangat perjuangan rakyat Irian Barat, tetapi mereka masih menunggu pemimpin politik yang mengatur perjuangan. Sesudah Mac Arthur membebaskan Irian dari Jepang, dia menyerahkannya ke pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA, yang ingin mengembalikan Irian kedalam penjajahan Belanda.

Gerakan perlawanan kepada penjajah Belanda dimulai di Jayapura, diorganisasikan oleh Sugoro seorang eks Digulis bersama-sama dengan pejoang-pejoang putera daerah seperti Silas Papare dan Martin Indei.

Insiden pertama terjadi pada tanggal 31 Agustus 1945 di Hollandia, ketika rakyat yang diperintahkan untuk mengibarkan bendera Belanda dalam rangka merayakan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. Tetapi rakyat mengibarkan Bendera Amerika, Merah Putih dan Bendera Belanda setengah tiang. Akibatnya Belanda melalukan penangkapan dan melarang pengibaran Merah Putih. Walaupun ada penangkapan-penangkapan gerakan perlawanan semakin meluas. Kata IRIAN sebagai ganti Nederlandsche Neew Guinea semakin dipopulerkan. Pemimpin gerilya seperti Silas Papare, M. Indei, Dumkorem dan lain-lain, telah dikoordinir serta Polisi, penduduk sipil dan Batalyon Papua sudah dipengaruhi. Pemberontakan vang direncanakan tanggal 25 Desember 1945 tercium Belanda, Sugoro dan pemimpin gerakan lain ditangkap.

Didalam penjara Sugoro merencanakan lagi pemberontakan bersama dengan Silas Papare dan Martin Indei. Gerakan ini tercium lagi oleh Belanda, lalu dilakukan pembersihan. Silas Papare dipindahkan ke Serui dan disana dia bertemu dengan Dr Sam Ratulangi, Dr Gerungan, L Tobing yang dibuang kesana. Perjoangan Nasional menjadi semakin meningkat dengan bantuan dari pemimpin buangan ini menjadi pusat gerakan perjoangan melawan penjajah di Irian.

Perjoangan terorganisasi dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Organisasi politik pertama terbentuk di Hollandia Binnen (Abe) dengan nama Komite Indonesia Merdeka (KIM) kemudian di Biak dibentuk Partai Indonesia Merdeka (PIM) dan pada tahun 1946 di Serui dibentuk Partai Politik yaitu Partai Kemerdekaan Indonesia di Irian (PKII) dipimpin oleh Silas Papare. Di Manokwari berdiri gerakan Merah Putih tahun 1946 yang meluas ke Babo, Kokas, Fak-Fak dan Sorong dipimpin oleh Sangaji Mulan dan Samuel Kawab. Di daerah Sorong dan Raja Ampat berdiri Badan Perjoangan Indonesia (BPI) dengan pemimpin Muhammad Ahmad.

Walaupun Belanda terus melakukan penangkapan-penangkapan dari Irian tetap bergolak. Perjuangan Partai Politik diselingi dengan perjoangan bersenjata. Akibatnya terjadi insiden di beberapa tempat seperti : di Biak, Manokwari, Fak-Fak, Merauke dan Tanah Merah.

Perlawanan bersenjata yang terjadi dalam periode ini adalah :

- Perang gerilya yang dipimpin Lodewik Mandapan di daerah Kepala Burung.
- Perang gerilya yang dipimpin Samuel Kawab di daerah Teluk Bintuni.
- Perlawanan rakyat Kokas terhadap Belanda yang dimulai dengan penurunan bendera Belanda. Terjadi pertempuran antara rakyat dan tentara Belanda. Belanda tidak kuat sehingga mendatangkan bantuan dari Sorong. Akhirnya Raja Kokas M. Rumagesang ditangkap dan dibawa ke Sorong. Usaha perlawanan yang tidak pernah patah dari M. Rumagesang menyebabkan dia ditangkap dan ditawan di Manokwari, kemudian dibawa lari ke Hollandia, ke Makasar dan

In order to carry out the "Trikora", the Indonesian government established the Mandala Comman, namely the special armed forces to liverate West Irian. While the soldiers of Mandala fought against the Dutch soldiers, both the government of Indonesia and the Netherlands discussed with the United Nations as the mediator. The discussions which began in July, 1962 achieved an agreement on August, 15, 1962 namely the transfer of Irian Jaya to the Indonesian government. On Octover 1, the responsibility and authority on Irian Jaya was transferred to UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) until May 1, 1963 and since that time Irian Jaya fully integrated to Indonesia.

In 1969 the Indonesian government vied for public opinion pooling (Pepera) to find out whether the people of Irian Barat wish to integrate with the Indonesian government or esle. Through the deliveration council of Pepera, the people of Irian Barat state their wish so chose Indonesia as their country. The Government of Indonesia then formally made West Irian the 26th province of the Republic based on Law No 12/1969, and according to the regulation of Minister of Home Affairs No 5/1973, the name of West Irian was changed into Irian Jaya. This name was made official by President Soeharto on March 3, 1973 when officiating the Tembagapura Mining Company.

6. The Establishment of Irian Jaya Province

The Dutch officially established public administration in Irian Jaya as of 1982. In the beginning West Irian constitutes a Residency which was established in 1921 under the direction of the Governor of the Moluccas in Ambon. In 1922 West Irian was divided into 2 residencies and at last became 6 afdeling (divisions). In 1949 the government of Netherland through the Round Table Conference in Den Haag seperated Irian Jaya from Indonesia and declared Irian Jaya as the province of the Netherlands based on "Bewind Regeling Niew Guinea" and based on the regulation by the government of the Netherlands, Irian Jaya is headed by a governor. The execution of public administration is conducted by a Secretary. Several offices were established in order to carry out the government policies and to support the task of governor. All the heads of the offices are directly responsible to the governor. All the heads of the offices are directly responsible to the governor. Thu council called "Raad Van Dienst Hoofden" (Council of office heads) is established in order to coordinate those offices. Through the said council the governor composed a programme to support public administration.

In the last period before the transfer of Irian to Indonesia through UNTEA, the region of Irian Jaya was devided into several administration units (residency), Onderafdeling (sub division), section and villages. When Irian Jaya was transferred to Indonesia, Irian Jaya was devided into 6 afdeling (division), 23 onderafdeling (sub division), 5 exploration resorts and 75 sections.

Beside the public administration established by the Netherlands, since 1956 the government of Indonesia established the autonomous province of West Irian based on Law No 15/1956 which took effect since August 17, 1956. This situation appears because in one hand the Dutch did not want to hand Irian Jaya to Indonesia, while in the other hand the Indonesia proclamation of independence insisted the liberation of the whole region of Indonesia from the colonialist, namely from Sabang to Merauke.

The "fought about" province of Irian Jaya consists of the big island of West Irian, other islands in it's surrounding including Kawedanan Tidore, the districts of Pantai and Weda in the North Moluccas. The capital of this province was Soasiu.

Soon after the transfer of Irian Jaya from UNTEA to the government of Indonesia the system of public administration could not be fully implemented like in the other provinces of Indonesia. During the period of 1963 - 1983 the structure of public administration in Irian Jaya underwent several changes. After the transfer of Irian Jaya to the government of Indonesia on May, 1, 1963, the execution of it's public administration was decided in the Presidential Decree No 1/1963. This Presidential Decree stipulates the principle regulation of the transitional administration in Irian Jaya. In line with Presidential Decree No 1/1963, the administration unit of afdeling, onderafdeling and ohter sections were directed to contribute the public administration of Irian Jaya in accordance with the directives of governor. Article 7 of this Presidential Decree stipulated that the governoris in charge of all civil offices in Irian Jaya. According to Presidential Decree No 2/1963 the said offices consist of the office of Public Administration, Finance, Social Affairs, Justice, Health, Education and Culture, Information, Economy, Communication and Public Works.

In the further development of the structure of public administration in IrianJaya, the word afdeling was changed into "Keresidenan" (residency), onderafdeling became "KPS" (Head of local administration) and the word "district" is still used.

The realisation of article 4 of Presidential Decree No 1/1963 the province of Irian Jaya was divided into 6 residencies, 23 KPS and 79 sections. In 1966 all keresidenan (regencies) in Indonesia were abolished, and the former residencies in Irian Jaya were changed into administrative units.

akhirnya ke Nusa Kambangan. Baru tahun 1950 dibebaskan pemerintah RIS.

Perlawanan rakyat Biak dipimpin oleh Stefanus Josef, seorang Bestuur assistant. Pemberontakan tercium sebelum hari yang direncanakan sehingga gagal. Josef ditangkap dan dipenjarakan di Hollandia. Dihukum seumur hidup dalam penjara Cipinang, baru dibebaskan tahun 1950 oleh Pemerintah RIS. Pimpinan lain seperti Petro ditembak mati. Pemimpin lain seperti Terianus Simbiak, Hanoch Rumbrar, Marcus Wattimena dibuang ke Digul. Belanda mencurigai S. Papare dan Dr Sam Ratulangi turut mendalangi pemberontakan ini.

Perjoangan dibidang diplomasi yang ditempuh dalam periode ini ialah pada Konfrensi Malino tahun 1946. Wakil dari Irian pada konfrensi ini antara lain Frans Kasiepo. Hasil yang dicapai delegasi ini adalah :

(1) Menggantikan sebutan Papua menjadi Irian.
(2) Pembebasan Sugoro dari hukumannya.
(3) Perhatian Belanda untuk memajukan rakyat Irian dan menjadikannya sebagai Keresidenan tersendiri.

Pada penyerahan kedaulatan Indonesia sebagai hasil KMB pada tanggal 30 Desember 1949, Irian Java tidak ikut diserahkan masih harus dirundingkan antara Belanda dan Indonesia.

Menghadapi sikap Belanda tersebut Indonesia menempuh berbagai usaha diplomasi yang akhirnya gagal.

Karena sikap keras kepala Belanda tersebut Indonesia mengambil langkah maju dengan mendirikan Propinsi perjuangan Irian Barat dengan Ibukota Soa Siu pada tahun 1956. Dikota itu didirikan Stasiun Radio perjuangan, yang menyiarkan siaran untuk rakyat Irian Barat. Rakyat Irian Barat tidak tinggal diam. Pada tahun 1956 timbul perlawanan rakyat di Obano. Belanda mengerahkan Marinir dan Polisi dengan pesawat KLM dari Biak ke Enarotali untuk menindas rakyat. Jumlah korban yang jatuh kurang lebih 1.000 orang. Dalam tahun itu rakyat Asmat berontak melawan Belanda. Pasukan Belanda mengganas menewaskan 700 orang rakyat.

Tahun 1956 ketika menteri Belanda Holders mengunjungi Sorong Kepala Suku mendesak kepadanya supaya mengadakan perundingan dengan Republik Indonesia dan menyerahkan Irian Barat kembali. Dalam periode ini tindakan terhadap pejoang-pejoang Irian Barat makin keras. Kaum pejoang ditangkapi dan disiksa.

Karena kegagalan berbagai jalan Diplomasi serta Politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia mengamanatkan Tri Komando Rakyatnya di Yogyakarta.

Isi Trikora tersebut adalah :

1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiapkan untuk mobilisasi umum guna mempertahankan Kemerdekaan dan Kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Untuk menunjang TRIKORA tersebut dibentuk Komando Mandala yaitu satuan Komando Khusus pembebasan Irian Barat. Indonesia terpaksa menempuh jalan konfrontasi bersenjata dan menggunakan kekuatan militer demi tercapainya Negara Kesatuan RI dari Sabang sampai Merauke.

Sementara Komando Mandala melancarkan taktik-taktik perangnya menghadapi angkatan bersenjatan Belanda. Pemerintah Indonesia dan Belanda melakukan perundingan dengan PBB sebagai perantara Perundingan yang dimulai sejak Juli 1962, mencapai persetujuan perdamaian dan tanggal 15 Agustus 1962, berupa penyerahan Irian Java kepada Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1962 berlangsunglah Pelaksana Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Temporary Executive Authority).

Pemerintahan peralihan PBB (UNTEA) berlangsung sampai 1 Mei 1968 dan sejak itu Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Pada tahun 1969 dilaksanakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) untuk mengetahui kemauan rakyat Irian Barat apakah akan memilih bersatu dengan RI atau tidak. Melalui Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) rakyat Irian Barat secara bulat memilih dan mengakui Republik Indonesia sebagai satu-satunya negara mereka. Irian Barat secara resmi ditetapkan sebagai Propinsi ke-26 dari Republik Indonesia berdasarkan UU No 12 Tahun 1969. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 1973 nama Irian Barat diganti menjadi IRIAN JAYA, secara resmi nama ini diumumkan oleh Presiden Soeharto, pada peresmian Tambang Tembagapura tanggal 3 Maret 1973.

6. Terbentuknya Propinsi Irian Jaya

Pemerintah Belanda secara resmi mendirikan Pemerintahan di Irian Java, sejak tahun 1828. Mula-mula wilayah ini dijadikan 1 keresidenan

In order to complete the aparatus of public administration in the level of district in Irian Jaya, in the period of 1967 - 1968 the government of Indonesia established the District House of Representatives. In carrying out the task of executive, the governor is assisted by 6 members of the Daily Executive Council (BHP). To assist the governor to carry out his administrative task, the government established the Provincial Secretariat, led by a provincial secretary.

As the follow up to the public opinion pooling (PEPERA) which decided Irian Jaya to become the part region of Indonesia, the government issued Law No 12/1969 which stipulated the establishment of the autonomous province and districts of Irian Jaya. The following regulations on administration was based on the Decision of the Minister of Home Affairs No 134 and 135/1970. Based on the said decision, the government established the provincial autonomous offices consisting of the office of Education and Culture, Social affairs, Health, Public Works, Forestry and Agriculture, while the establishment of 5 autonomous offices on the district level is decided in the Decision of Governor of West Irian No 177/1970.

To assist the governor in the field of administration, a regulation was issued regarding the structure of the organisation and job description of the provincial secretariat. In the said description, the business and responsibilities of the autonomous province was clearly seperated from the Central Government. In executing his task of provincial secretary, the governor is assisted by two administrators who coordinate 3 bureaus.

Eleven years after 1963 when Irian Jaya officially became the region of Indonesia, the achievement of development in the field of public administration and other sectors has increased. Because of the rapid progress achieved by Irian Jaya, the Central Government did not distinguish the structure of administration of Irian Jaya from other provinces in Indonesia. This is decised in Law No 5/1974 regarding the principles of provincial administration. The provincial administration of Irian Jaya consists of the Governor and Provincial House of Representatives. The job description of these two components are clearly stipulated in Law No 5/1974.

Social and Political Affairs

The awareness in their national and state life of the people of Irian Jaya at the present has much improved. This is obvious from the participation of the people in the development on the provincial and district level. Political and economic stability in Irian Jaya was strongly felt after the success of General Elections in 1971, 1977 and 1982.

In the 1982 General Elections, there were 642,639 people who had the right to vote. This number is the total votes of the three contestants, namely 20,354 votes for the United Development Party (PPP); 28,170 votes for Indonesian Democratic Party (PDI) and 594,415 votes for Functional Group (Golongan Karya).

Based on the valid votes of the 1977 General Elections in Irian Jaya, the composition of members of the Provincial House of Representatives are as follows : 30 from Golkar, 1 from PPP, 3 from PDI and 6 from the Armed Force Faction.

Based on data of the Provincial Office of Statistics of Irian Jaya and the Directorate of Rural Community Development (PMD), in 1985 this province has 9 districts, 117 sub districts, 66 Kelurahan (the lowest administratives unit) and 839 villages.

---

yang dibentuk tahun 1921, dibawah kekuasaan Gubernur Maluku yang berkedudukan di Ambon. Kemudian tahun 1922, dirubah menjadi 2 keresidenan dan akhirnya menjadi 6 Afdeling. Pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Negeri Belanda (Den Haag), Pemerintah Belanda memisahkan Irian Jaya dari Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai propinsi seberang lautan berdasarkan "Bewind Regeling Nieuw Guinea". Berdasarkan inilah Pemerintah Belanda pada waktu itu mengatur untuk menyelenggarakan pemerintahan di Irian Java, melalui pengangkatan seorang Gubernur sebagai pimpinan pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah dijabat oleh seorang sekretaris. Kemudian untuk mendukung kegiatan yang telah digariskan oleh penguasa pada waktu itu juga disusun dan dibentuk dinas-dinas yang diharapkan dapat berfungsi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dinas-dinas tersebut dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing menurut ketentuan yang berlaku pada waktu itu. Para kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Gubernur untuk melaksanakan koordinasi diantara dinas-dinas, dibentuk suatu dewan yang disebut "Raad Van Dienst Hoffden". Melalui dewan ini, Gubernur mengadakan musyawarah atau rencana-rencana yang penting mengenai tugas menyelenggarakan Pemerintahan.

Kemudian pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam perkembangan terakhir menjelang penyerahan Irian Jaya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui UNTEA. Irian Jaya dibagi menjadi beberapa wilayah (keresidenan). Onderafdeling (HPB atau KPS) dan distrik serta Kampung. Pembagian wilayah administrasi Irian Jaya pada masa penyerahan kekuasaan kepada Republik Indonesia terdiri dari 6 Afdeling, 23 Onderafdeling, 5 Exploratieresort dan 75 district.

Disamping adanya pemerintahan Belanda (Nederlands Nieuw Guinea) sejak tahun 1956 Pemerintah Republik Indonesia juga membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dengan Undang-undang No 15 Tahun 1956 yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1956. Hal ini disebabkan sikap Belanda tidak mau menyerahkan wilayah ini, sedangkan Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah membebaskan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Propinsi "Perjuangan" Irian Jaya ini meliputi pulau besar Irian Barat dan Pulau-pulau lain di sekelilingnya termasuk Kawedanan Tidore, Distrik Pantai dan Distrik Weda di Maluku Utara, Ibukota Propinsi ini berkedudukan di Soasiu.

Sesudah penyerahan kekuasaan dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Irian Jaya belum dapat segera dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dilaksanakan di daerah-daerah di Indonesia lainnya, melainkan harus melalui tahap-tahap peralihan sebelumnya dapat menyesuaikan dengan susunan Ketatanegaraan dan ketatausahaan Republik Indonesia. Selama waktu 1963 s/d 1983 struktur pemerintah di Irian Jaya mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut.

Dengan diserahkannya Irian Jaya kepada kekuasaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, maka untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Irian Jaya, Pemerintah RI mengeluarkan suatu penetapan Presiden RI No 1 tahun 1963 Penetapan Presiden tersebut mengatur tentang ketentuan pokok mengenai pemerintahan dalam masa peralihan. Dalam masa peralihan ini sesuai dengan Penetapan Presiden No 1 tahun 1963 Pemerintahan afdeling, Onderafdeling dan district termasuk badan perwakilannya, yang ada menjelang penyerahan Pemerintahan seluruhnya kepada Pemerintah RI, berfungsi membantu pemerintahan Propinsi Irian Jaya untuk menjalankan pemerintahan di daerah masing menurut petunjuk-petunjuk Gubernur. Hal ini menunjukkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, namun pada saat ini struktur Pemerintahan di tingkat afdeling serta distrik belum berubah dan atau disesuaikan dengan struktur Pemerintahan daerah di Indonesia lainya diluar Irian Jaya dalam pasal 7 Penetapan Presiden No 1 tahun 1963, menetapkan bahwa Gubernur membawahi semua peralatan Pemerintahan Sipil yang ada di daerah Irian Jaya dan mengadakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas peralatan-peralatan yang ada.

Peralatan-peralatan yang dimaksud adalah dinas-dinas Tingkat Propinsi yang menurut Keputusan Presiden RI No 2/INSTR/1963 (RHS) terdiri dari Dinas Pemerintahan, Keuangan, Sosial dan Kehakiman, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Perekonomian Rakyat, Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum.

Perkembangan selanjutnya dalam struktur Pemerintahan istilah-istilah afdeling diganti dengan Keresidenan, onder-afdeling diganti dengan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) sedangkan istilah district sementara masih tetap digunakan.

Selanjutnya sebagai realisasi pasal 4 Penetapan Presiden No 1 tahun 1963, Propinsi Irian Jaya dibagi menjadi 6 Keresidenan : 23 KPS dan 79 District. Pemerintahan berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan, diadakan pemekaran wilayah dan dibentuk KPS dan distrik baru, sehingga pada waktu tahun 1963 Irian Jaya memiliki 27 KPS dan 90 distrik. Tahun 1966 Keresidenan dihapus untuk seluruh Indonesia, termasuk Irian Jaya. Dan khusus di Irian Jaya, bekas Keresidenan dijadikan Kabupaten Administratif.

Untuk penyempurnaan aparatur Pemerintahan ditingkat Kabupaten pada tahun 1967-1968 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di seluruh Propinsi Irian Jaya. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Gubernur Kepala Daerah dibantu 6 (enam) orang anggota Badan Pemerintah Harian (BPH). Dan untuk membantu tugas-tugas Gubernur dalam bidang Administratif, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Jaya No 69/GIB/1963 dibentuk Sekretariat Daerah yang dipimpin seorang Sekretaris Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang menetapkan Irian Jaya tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Pemerintah, di Irian Jaya yang efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Jaya, maka pada bulan September 1969 dikeluarkan Undang-undang No 12 tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 134 dan No 135 tahun 1970. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, dibentuklah Dinas Otonom untuk tingkat propinsi yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten diatur pula melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat No 177/GIB/1970 untuk membentuk 5 (lima) dinas Otonom.

Selanjutnya untuk membantu Gubernur Kepala Daerah dalam bidang administrasi, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 1969 dan No 10 tahun 1960 disusun struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Irian Jaya yang dituangkan dalam peraturan No 2 tahun 1970. Dalam struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah yang baru ini sejalan dengan pemberian Otonom kepada Propinsi dan Kabupaten-Kabupaten di Irian Jaya, maka dalam sekretariat daerah yang baru ini mulai dipisahkan antara urusan Pemerintahan Umum Pusat dan Urusan Otonom. Urusan otonom, dikoordinir sekretariat daerah yang dibantu oleh dua orang administrator yang mengkoordinir 3 (tiga) biro.

Sejak Irian Jaya diserahkan kepada Pemerintah RI tahun 1963 sampai dengan tahun 1974 Pemerintahan Propinsi Irian Jaya telah berjalan selama 11 tahun. Dalam usia itu Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya telah mengalami kemajuan-kemajuan di bidang Pemerintahan maupun hasil-hasil yang dicapai dalam bidang pembangunan. Mengingat kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah Deerah Propinsi Irian Jaya, Pemerintah Pusat menganggap bahwa daerah Irian Jaya sudah sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, maka kekuasaan yang selama ini diberikan kepada Irian Jaya dihapus. Dalam bidang Pemerintahan dengan berlakunya Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah Daerah, di Propinsi Irian Jaya diseragamkan dengan struktur Pemerintahan di Daerah Tingkat I di luar Irian Jaya.

Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya terdiri dari Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pembagian tugas antar dua komponen tersebut cukup jelas dalam Undang-undang No 5 tahun 1974.

Sosial Politik

Kehidupan sosial politik di Propinsi Irian Jaya setelah berakhirnya PEPERA Irian Barat tahun 1969 yang menyatakan keputusan secara aklamasi oleh rakyat Irian Barat untuk tetap bersama Republik Indonesia, dan tak mau dipisahkan. Sudah semakin mantap walaupun masih diakui masih ada rintangan dan tantangan dari sekelompok kecil masyarakat yang tidak mau menerima kenyataan tersebut.

Dan tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara telah meningkat. Hal ini dapat kita melihat peranserta masyarakat Irian Jaya dalam berbagai kegiatan pembangunan bersama-sama dengan aparatur Pemerintahan di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten. Kestabilan politik dan ekonomi di Irian Jaya juga semakin dirasakan dan telah mampu menjamin terlaksananya Pemilihan Umum dalam tahun 1971, 1977 dan 1982.

Dalam Pemilihan Umum tahun 1982, Propinsi Irian Jaya yang mempunyai hak pilihnya ada sebanyak 642.939 suara. Jumlah suara dilihat dari komposisi suara yang diperoleh untuk masing-masing organisasi Politik dan Golongan Karya, yaitu untuk Partai Persatuan (PPP) sebanyak 20.354 suara, Golongan Karya (Golkar) 594.415 suara dan Partai Demokrasi Indonesia 28.170 suara.

Berdasarkan hasil suara pemilih yang masuk dan sah itu maka perimbangan kekuatan politik di dalam DPRD Tingkat I sebagai berikut : Pada Pemilu 1977 Golkar mendapat sebanyak 30 kursi, PPP mendapat 1 kursi, PDI mendapat 3 kursi, ABRI mendapat sebanyak 6 kursi.

Berdasarkan data dari Direktorat PMD dan Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya, pada tahun 1985 bahwa jumlah Kabupaten di Irian Jaya ada sebanyak 9 (sembilan) buah, kecamatan 117 buah, kelurahan 66 buah serta desa 839 buah.

BAB / *CHAPTER II*

PEMBANGUNAN DAERAH / *REGIONAL DEVELOPMENT*

SEJALAN dengan pembangunan nasional, dengan mengingat kondisi serta potensi daerah yang ada, arah pembangunan daerah Irian Jaya ditekankan pada beberapa hal yang mendasar. Adanya peningkatan dan keseimbangan pertumbuhan antar wilayah maupun antar sektor misalnya, merupakan satu konsepsi yang terus diupayakan. Di Irian Jaya, penanganan daerah pedalaman merupakan inti pokok persoalan pembangunan daerah.

Irian Jaya juga tetap meletakkan landasan yang kuat untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Pola pikir demikian dimaksudkan untuk mencapai terciptanya landasan yang kuat bagi masing-masing sektor dan dapat mewujudkan tahapan pembangunan selanjutnya. Konsepsi demikian pada gilirannya akan dapat memperkecil perbedaan yang terdapat dalam masyarakat, terutama antara yang terbelakang dan yang maju, antara yan kaya dan yang miskin.

Sejalan dengan itu, kebijaksanaan diarahkan pada peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat juga investasi digerakkan. Oleh sebab itulah strategi pembiayaan diatur dengan seoptimal mungkin untuk merangsang potensi dana yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian akan diusahakan agar kontribusi pembiayaan sektor masyarakat atau swasta dapat lebih menonjol.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, daerah Irian Jaya dibagi menjadi 4 (empat) wilayah pembangunan, dengan memperhatikan pula batas-batas administratif sebagai berikut :

Wilayah Pembangunan I (Jayapura dan Jayawijaya); Wilayah ini mempunyai ciri-ciri utama sebagai pusat utama kendali kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan dari seluruh Wilayah Irian Jaya, dimana sebagian diantaranya merupakan daerah terisolir yang terbelakang tingkat pertumbuhannya. Untuk wilayah ini titik berat pengembangannya diarahkan kepada pembentukan/peningkatan zone pendukung ekonomi serta usaha pemecahan isolasi dan pengembangan daerah pedalaman dan perbatasan.

Wilayah ini terbagi dalam 2 (dua) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu : SWP Jayapura, dengan ciri-ciri utama : homogen dalam hal potensi sumber daya alamnya yang tersebar ke dalam 4 Wilayah Pengembangan Partial (WPP). Lahan yang cukup subur sangat cocok untuk pengembangan budidaya : kelapa sawit, karet, coklat, kelapa, padi serta palawija. Dengan demikian merupakan potensi utama program penempatan transmigrasi. Untuk itu dalam Pelita IV akan direalisir program Transmigrasi, transportasi darat dan penggalian sumber daya alam melalui PIR (kelapa sawit dan karet).

Kelompok kedua adalah SWP Jayawijaya dengan ciri-ciri utama : merupakan daerah terisolir, kehidupan penduduknya sebagian besar masih sangat tradisional dan mempunyai lahan pertanian yang cukup subur untuk budidaya palawija dan sayur-sayuran. Sejak dimulainya Pelita di Irian Jaya sangat sukar usaha untuk mengembangan daerah tersebut. Oleh sebab itu diambil langkah-langkah dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangannya, kawasan ini disatukan dengan Jayapura dalam satu wilayah Pembangunan. Dalam Pelita IV kebijaksanaan pembangunan diarahkan kepada peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang usaha perkebunan, pertanian, peternakan, taraf hidup dan penghidupan masyarakat Jayawijaya dan kondisi sangat tradisional agar setaraf dengan saudara-saudaranya di daerah pantai yang relatif lebih maju, diiringi dengan pembinaan kesadaran lingkungan dalam rangka penyelamatan DAS Baliem.

Wilayah Pembangunan II (kawasan Biak Numfor), Wilayah ini mempunyai ciri utama pada pola angkutan dalam kawasan Biak Numfor yang mencakup 4 (empat) Kabupaten. Diharapakan dengan diterapkannya pola angkutan laut dengan Biak sebagai modal dapat ditingkatkan laju pertumbuhan wilayah ini. Wilayah Pembangunan II ini terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu : SWP Biak Numfor, (b) SWP Manokwari, (c) SWP Panilai, (d) SWP Yapen Waropen.

Kebijaksanaan Wilayah Pembangunan II ini lebih banyak diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi terutama lintas ferynya dalam menjangkau 4 (empat) Kabupaten dalam satu sistem. Dalam Pelita IV titik berat pengembangan wilayah ini selain angkutan laut dalam kawasan Biak, Numfor, juga usaha pengembangan wilayah melalui program transmigrasi (Manokwari, Nabire) dan membuka isolasi bagi Yapen Waropen serta daerah pedalaman Paniai. Sektor prioritas yang akan direalisir meliputi : Transmigrasi, perhubungan dan pertanian.

Wilayah Pembangunan III (Sorong - Fak-Fak) mempunyai ciri-ciri khas sehubungan dengan kondisi ekspornya (ikan, udang, kayu dan minyak bumi, tembaga, minyak kayu putih, pala dan kulit). Wilayah ini terbgi atas 5 (lima) SWP yaitu : (a) SWP Salawati-Aimas, (b) SWP

PARALLEL with the national development, the direction of regional development in the Province of Irian Jaya is focussed on several very basic, potentials for example, the correct handling of hinterland and remote area, which became, the main question of regional development. That is why, the increase and the balance of growth in all sectors of development need to be examined by all means. To this ends, the Province of Irian Jaya has placed a strong basic conception of development that makes all plans to grow on their own. This conception was aimed as a way to reach the platform of development in every sector, and, to realise the higher steps of development.

With such concepts it is hoped that the gap existing in the society could be minimise, especially that between the rich and the poor and between the developed and the underdeveloped.

In line with the policy mentioned above, measures are directed to increase the society's initiatives, participation, and, to drive investment as well. Therefore the strategy of budgeting was arranged with aim to stimulate budget resources from within the society itself. To this goal, the government will making further efforts to make society contribution in development budgeting as well as that of the private enterprises more apparent.

Based on the said conception, the Province of Irian Jaya is divided into 4 (four) regional development areas, namely;
Development Area I. covers Jayapura and Jayawijaya. This are has a specific characteristic as the center of local government activities as well as its development, but at the same time most parts of the area are still isolated and at low level rate of growth.

To overcome this condition, the centre point of development is focussed on the establishment of economic supplied zone, to break isolation of the remote areas and enhance development of the border areas.

The Province's regional development area I is divided into two SWP (sub-regional areas) namely : SWP Jayapura and SWP Jayawijaya. The Development Sub-regional Jayapura is very fertile and good for agriculture development of palm oil, rubber, cocoa, coconut tree, rice field and horticultures. This area is also potential for the implementation of transmigration placement programme. Therefore during the Pelita IV period several programmes in the fields of Transmigration, Land Transport will be realised together with the exploitation of natural resources through the PIR (Nucleous Estate and smallholder) Project of Palm and Rubber.

The development sub regional (SWP) of Jayawijaya is an isolated area and the standard of living of the population is relatively low but, the soil is fertile for horticulture and vegetables cultivation. Since Pelita I, efforts have made through development programmes to accelerate a faster rate of growth and development of this area.

In Pelita IV the development policy is directed to increase the accesibility in supporting efforts concerning plantation estates, rice farming, enimal husbandry, for a better standar of living so that the traditional condition of the people of living so that the traditional condition of the people of Jayawijaya can match that of their brothers, living in the coastal area which is relatively better.

The Regional Development Area II (WP II) covers Biak and Numfor. The characteristic of this development area is the pattern of transportation in the biak and Numfor region which covers four districts of the area. With Biak as basic asset, it is hoped that the sea transportation pattern applied here can make this area develop faster. The Regional Development Area II is divided into four Sub Regionals namely; (a) sub regional Biak Numfor, (b) sub regional Manokwari, (c) sub regional Paniai and (d) sub regional Yapen Waropen.

The policy of development in this development area, is more directed to foster transportation sectors, its facilities as well as infrastructures, especially to make ferry connections to link the four districts of this area in one integrated transportation system. During the Pelita IV period, the development is stressed not only on the sea transportation programmes of the Biak Numfor region, but also on the regional development through transmigration programmes in Manokwari and Nabire and to be able to reach the isolated area of Yapen Waropen, as well as the remote area of Paniai. The priority sectors for development in this area is transmigration, transportation and agriculture.

The Regional Development Area III covering Sorong and Fak Fak is famous for its export commodities of fish, shrimp, logs, crude oil, copper, eucalyptus oil, nutmeg and hide. This Regional Development Area III is divided into five sub-regional development areas (SWP) namely; (a) SWP Salawati - Aimas, (b) SWP Ayamaru - Bintuni, (c) SWP Bomberi - Karas - Tomage, (d) SWP Kaimana, and (e) SWP Timika. The development efforts of this area are stressed on accelarating export drive and to increase economic supplying zones.

Ayamaru-Bintuni, (c) SWP Bomberi-Karang-Tomage, (d) SWP Kaimana, (e) SWP Timika.

Titik berat pengembangan wilayah ini kepada : peningkatan ekspor dan peningkatan zone pendukung ekonomi. dalam Pelita IV yang merupakan sektor-sektor prioritas yaitu perikanan, perkebunan, transmigrasi, perhubungan dan pertambangan.

Wilayah Pembangunan IV (Merauke); mempunyai ciri-ciri hampir seluruhnya merupakan kawasan yang potensial untuk usaha pertanian, tetapi hambatan utamanya adalah masalah air berhubungan dengan keadaan iklim, baik air untuk keperluan sehari-hari maupun untuk irigasi penunjang pertanian. Wilayah ini terdiri dari 2 (dua) SWP : (a) SWP Merauke - Tanah Merah, (b) SWP Agats. Titik berat pembangunan wilayah ini diarahkan pada usaha peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Kebijaksanaan dalam Pelita IV diarahkan kepada transmigrasi, pertanian, irigasi dan pembangunan prasarana transmigrasi.

Dari pengalaman selama Pelita I, II dan III diharapkan dengan adanya pembagian wilayah pembangunan ini tercipta kekhasan daerah yang mendorong terjadinya pengembangan wilayah, kesempatan untuk tumbuh, dapat mewujudkan perdagangan antara daerah serta daya tarik dari masing-masing daerah tanpa mengesampingkan aspek interdependensi.

Dalam kaitannya dengan penggunaan dana APBN, Pemerintah Daerah selalu berorientasi pada program daerah mengingat pembangunan daerah pada dasarnya juga untuk kepentingan pembangunan nasional. Pengarahan dan penggunaan anggarannyapun diusahakan sesuai dengan kebijaksanaan daerah. Dengan demikian di Irian Jaya hanya ada satu rencana pembangunan, yaitu rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah serta Pelita Daerah.

Mengenai anggaran pendapatan asli daerah juga diarahkan untuk memperbesar biaya pemeliharaan dan rehabilitasi barang modal milik Pemerintah Daerah serta diarahkan kepada usaha yang berkaitan dengan pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah.

Sejak tahun 1955 subsidi Pemerintah Belanda meningkat dan pada tahun 1962 naik hampir 7 x lipat dari subsidi pada tahun 1950. Lihat Tabel II-1.

Jikalau dilihat susunan angka dalam periode 1950 - 1962, maka nampak bahwa bagian terbesar daripada anggaran Pemerintah Belanda disalurkan untuk kegiatan rutin yang sifatnya menunjang terselenggaranya roda pemerintahan. Bagian yang diperuntukkan bagi investasi atau belanja pembangunan hanyalah sebagian kecil saja.

Tampak bahwa jangkauan investasi pada saat ini terbatas. Akibatnya hanya daerah-daerah perkotaan dan sekitarnya yang dapat menikmati kegiatan pembangunan sehingga tidak mengherankan jika prasarana perhubungan dan pelayanan sosial lainnya lebih banyak terpusat pada kota-kota daerah pantai. Jaringan jalan beraspal panjangnya tidak melebihi 100 km dan jaringan-jaringan jalan lainnya terbatas pada pusat-pusat pemukiman di sekitar kota. Pelayanan sosial lainnya seperti listrik, air minum, pelayanan kesehatan masih banyak berpusat di kota-kota. Usaha untuk mengembangkan daerah pedalaman kurang mendapat perhatian mengingat pengembangan daerah pedalaman ini membutuhkan investasi yang besar.

Seperti kita ketahui, kini kegiatan pembangunan di Irian Jaya dibiayai dari berbagai sumber (APBN, Bantuan Inpres, APBD, dan Penanaman Modal). Lihat Tabel II-2.

Jumlah dana Pembangunan dari sektor Pemerintah tersebut sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dan sebagian kecil diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Lihat Tabel II-3.

Data pembangunan yang bersumber dari sektor swasta yang tercatat datanya adalah penanaman modal PMDN dan PMA yang meliputi bidang-bidang kegiatan pertambangan tembaga, nikel, perikanan, perkebunan, industri perkayuan, dan perkreditan KIK, KMKP dan kredit-kredit Bank lainnya.
Sedangkan investasi swasta lainnya yang diduga cukup besar jumlahnya setiap tahun seperti pertambangan minyak bumi tidak terdapat datanya, sehingga tabel investasi dibawah ini tida termasuk investasi di luar PMDN, PMA dan kredit Bank. Lihat Tabel II-4.

1. Proyek Pelita Nasional

Pelaksanaan pembangunan daerah Irian Jaya pada tahun ketiga Pelita III ternyata banyak memberikan manfaat dan harapan yang lebih cerah. Memang banyak tantangan yang dihadapi, namun berkat kerja keras dan dukungan masyarakat yang demikian besar, akhirnya hambatan dan tantangan tersebut dapat diatasi. Tegasnya, pelaksanaan pembangunan sejak Pelita I, II dan III secara nyata telah memberikan perubahan yang positif dalam masyarakat. Untuk diketahui, sejak Pelita

In Pelita IV, the priority sectors are the fishery, plantation, transmigration, transportation and mining.

The Regional Development Area IV covering region of Merauke has a big potential for agricultural development but the area lacks water distribution, for daily use and irrigation. The Regional Development Area III is divided into two Sub Regional Development Area namely; SWP Merauke - Tanah Merah and SWP Agats. In this regional development area, the development activities are focussed on efforts to increase agricultural and animal husbandry productions. During Pelita IV, policies are directed to programmes on transmigration, agriculture, irrigation and the construction of transmigration infrastructures.

Learning from experience during Pelita I, II and III, the division of regional development areas with their own characteristics can become pushing factors of the province's development its opportunity to grow, interregion trading etc.

In connection with the consumption of State Budget, the regional government policy is always oriented to the interest of the regional development because the essence of the province's development complements to the national development as a whole. So the directions and the spendings of state budget are managed according to the regional government interest.

In other words, here in Irian Jaya there exists only one Regional Development Plan that is called Basic Pattern of Regional Development and Regional Five Years Development. As to the funds coming from the Province's Genuine Income, it is managed to add to the maintenance coast and rehabilitation of the regional government assets and to efforts connected with higher effectiveness of the state apparatus.

Since 1955 the subsidy from the Netherlands Government had been increasing, up to seven times of the 1950 subsidy in 1962. See Table II - 1

Tabel : *Table II — 1*

(dalam jutaan IB Rp.)

Tahun *Year*	Pengeluaran *Expenditure*		Penerimaan *Budget supply*		Jumlah anggaran *Total Budget*
	Rutin *Routine*	Pembangunan *Development*	Rutin *Routine*	Subsidi R.I. *Subsidy provided by Indonesia*	
1963	83,4	13,4	30,0	83,8	96,8
1964	105,0	16,5	36,1	85,4	121,5
1965	105,6	11,9	38,1	79,4	117,5
1966	117,7	8,6	41,4	84,9	126,3
1967	130,6	8,2	45,9	92,9	138,8
1968	208,5	46,4	67,3	187,6	254,9
1969/1970	611,0	210,0	-	-	-

Sumber : A Design for development in West Irian, UNDP 1968
Source : A Design for Development in West Irian, UNDP 1968

The figures for the period of 1950-1962 show that the greater amount of the Netherlands Government budget was used to finance routine activities to enhance public administration. The budget for investment or development expenditure made up only a small amount.

Investment only covered a very limited area at the time. As a result, only urban areas and environs could enjoy the result of development activities. It is thus no surprise that communication infrastructures and other social services were mainly found in coastal cities. Asphalt road did not exceed 100 km, while other road networks were only found in settlement centres around the cities.

Meanwhile the efforts for hinterland development were somewhat neglected since it requires a staggering amount of investment.

At present the budget for development activities in the Province of Irian Jaya comes from many sources, for instance, the State Budget, Provincial Budget, Investments, Inpres aid and others. See Table II-2.

The largerpart of development fund for Government Sectors comes from the National Government and the smaller is of Province Genuine Income. See Table II-3.

Development data obtained from private sectors concerning investment were those of PMDN (Domestic Investments) and PMA (Foreign Investments) covering activities in the fields of Copper Mining, Nickel, Fishery, Plantation, Longging Industry, Small Investment Credits (KIK), Permanent Working Capital Credits (KMKP), and other Bank Credits. Table below shows number of investment of the Domestic Investment Programme (PMDN), Foreign Investment (PMA) and Bank Credit. See Table II-4.

1. The National Five-Year Development Plan Projects

The execution of the regional development in the Province of Irian Jaya during the third year of Pelita III has shown big success and has brought

Tabel / *Table II — 2*

DANA PEMBANGUNAN DARI SEKTOR PEMERINTAH SELAMA PELITA III DI IRIAN JAYA (DALAM RIBUAN RUPIAH) DISESUAIKAN DENGAN HARGA KONSTAN TAHUN 1983
DEVELOPMENT FUNDS FROM GOVERNOR SECTOR IN IRIAN JAYA DURING PELITA III (IN THOUSAND RUPIAH) ACCORDING TO CONSTANT VALUE OF 1983

No.	Uraian / *Description*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
	Dana Proyek/ *Project Funds*					
1.	Sektoral/*Sectoral*	14.483.868	36.151.727	56.286.621	88.873.105	81.828.488
2.	Inpres Dati I/*Inpres Aid for Provincial Development Projects*	2.600.000	5.150.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000
3.	APBD Dati I/*Provincial Budget*	3.280.080	3.851.629	2.714.000	324.000	632.500
4	APBD Dati II/*District Budget*	1.154.021	2.237.891	2.896.788	2.201.402	2.762.550
5	Inpres Dati II/*Inpres Aid for District Development Projects*	735.795	1.068.442	1.537.960	1.742.118	1.780.776
6.	Inpres Penunjangan jalan Dati II *Inpres Aid for District Roads Rehabilitation*	1.037.770	1.413.500	2.098.588	2.343.000	2.852.000
7.	Inpres SD/	2.402.065	4.753.000	5.665.654	9.376.415	10.973.363
8.	Inpres Sarkes/*Inpres Aid for Health Facilities*	345.764	503.049	1.228.201	1.327.306	-
9	Inpres Pasar/*Inpres Aid for Marketing Facilities Development*	-	-	-	1.516.275	1.321.300
10.	Inpres Bangdes/*Inpres Aid for Rural Development*	452.740	719.310	996.900	1.269.250	1.418.500
11.	Banpres/*Presidential Aid*	199.479	197.122	48.246	1.307.416	45.000
	Jumlah / *Total*	26.691.582	56.345.671	80.972.954	119.180.187	109.614.258
	Index	119,85%	113,28%	101,71%	105,02%	100%
	Jumlah setelah disesuaikan dengan harga konstan 1983 *Total after conforming with constant value in 1983*	31.989.459	63.828.316	82.357.591	125.162.979	100.614.258
	Pertambahan/*Additions*	31.838.857	18.529.275	43.505.388	-	15.548.721

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya
Source : Book of Repelita IV of Irian Jaya Province.

Tabel / *Table II — 3*

(dalam ribuan rupiah)

No.		1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
1	Penerimaan rutin *Routine Revenue*	899.660	1.080.802	1.643.379	2.158.805	2.027.383
2.	Penerimaan pembangunan/ *Development Revenue*	1.017.839	1.315.433	977.742	1.083.834	691.917
	Jumlah / *Total*	1.917.499	2.396.235	2.621.121	3.242.639	2.719.286

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya
Source : Book of Repelita IV of Irian Jaya Province.

III sampai dengan tahun keempat Pelita III pengalokasian dana pembangunan di Irian Jaya melalui APBD dan Inpres terus meningkat dari 50% sampai 100%.

Anggaran pembangunan proyek-proyek sektoral pada tahun anggaran 1979/1980 jumlahnya mencapai Rp15.000.000.000,- dan naik di tahun 1982/1983 menjadi Rp87.050.000.000,- Namun pada tahun berikutnya dana tersebut menurun sekitar 14,65% atau menjadi Rp74.289.000.000,- Lihat Tabel II — 4a

Termasuk dalam pembangunan proyek tersebut ialah meliputi pembangunan bidang sosial, ekonomi dan bidang umum. Di Irian Jaya, keadaan pelaksanaan proyek-proyek nasional mencerminkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Mengingat proyek tersebut pada dasarnya merupakan perpanjangan dari departemen yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah berusaha agar APBN dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kaitan ini diusahakan agar dapat berjalan lancar, tepat waktu dan hasilnya segera dapat dinikmati oleh masyarakat banyak.

Itu pula sebabnya aparat Pemda Irian Jaya secara langsung terlibat menangani secara aktif. Baik pada tingkat perencanaan maupun pada tahap pelaksanaannya. Seperti peninjauan lokasi, monitoring serta pemecahan masalah. Pemerintah Daerah juga terus berusaha agar pembangunan sektoral harus terkait dengan pembangunan regional. bahkan jika dilihat keadaannya sekarang, pelaksanaannya dapat diperinci menjadi kegiatan regional. Demikian juga pembangunan regional, tidak lepas dari kebijaksanaan sektoral. Konsepsi demikian dimaksudkan agar antara dua kegiatan pembangunan tersebut dapat berjalan secara terpadu dan mantap.

brighter hopes for the future of the province. Indeed besides of the big success there were also challenges to be faced, but owing to the hard work of the people and their full participation in the development, all handicaps and constrains can be solved and the projects carried out. In fact, the development of Pelita I up to Pelita III in Irian Jaya has brought positive changes to the people of the Province. For information, until the fourth year of Pelita III the allocation of development funds through the provincial budget and Inpres Aid in Irian Jaya has increased by 50% to 100%.

The development budget for sectoral projects for fiscal year 1979/1980 amounted to Rp 15,000,000,000,- which rose to Rp 87,050,000,000,- in 1982/1983. But in the following year the budget decreased by 14.65% amounting to Rp 74,289,000,000,-. See Table II-4a.

Included in the said programmes is the development of social affairs, economic, and general affairs. The realisation of national development projects in Irian Jaya reflects a promising progress and the regional government of Irian Jaya always tried to meet the expenses of the projects. For that reason all the apparatus of the province involve themselves in the activities namely from the very beginning of the activities like observation, monitoring and execution, and the regional administration will always make sure that the regional development projects go in line with the other sectors. Vis a vis the sectoral development must also reflect their connection with the regional development as a whole. This concept is meant to make two kind of development activities in Irian Jaya run parallel, integrated and steady.

Particularly, the sectoral development is expected to stabilis the economic structure of the region that actually needs a strong back up. On the other side, the regional development should be able to channel the people's aspirations which will then motivate them to partisipate in the development process.

Secara khusus, pembangunan sektoral bahkan diharapakan bisa memantapkan struktur perekonomian daerah yang masih perlu dukungan. Di pihak lain, pembangunan regional diupayakan agar mampu menampung aspirasi dan memotivasi partisipasi masyarakat. Misalnya dalam hal mendayagunakan sumbedrdaya alam untuk membuka daerah baru serta menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Irian Jaya.

Jika pada Pelita I dimulai dengan kondisi yan belum mantap, maka pada Pelita II kondisi sosial ekonomi, relatif sudah membaik. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijaksanaan sektoral diprioritaskan pada pembangunan prasarana (khususnya perhubungan), pendidikan, pertanian dan kesehatan. Ketika Pelita I dilaksanakan penempatan transmigrasi belum merupakan program pokok, akan tetapi mulai dirintis secara lebih mendasar dan terarah.

2. Program Inpres Dati I dan Inpres linnya

Seperti dijelaskan sebelumnya, program Inpres secara khusus dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah, mengingat dana sektoral yang dialokasikan untuk daerah relatif sangat terbatas. Untuk tahun anggaran 1978/1979 Daerah Tingkat I Irian Jaya memperoleh bantuan Inpres Dati I sebesar Rp2.000.000.000,- Dari jumlah

Tabel / *Table II — 4*

BERMACAM—MACAM KREDIT INVESTASI MELALUI BANK SELAMA PELITA III DI IRIAN JAYA (DISESUAIKAN DENGAN HARGA KONSTAN 1983)
KINDS OF INVESTMENT CREDITS VIA BANKS DURING PELITA III IN IRIAN JAYA (IN ACCORDANCE WITH CONSTANT VALUE IN 1983)
(dalam ribuan rupiah) / *(in thousand rupiah)*

Tahun *Year*	Jumlah *Total*	Harga konstan 1983 *Constant Value of 1983*		Pertambahan Investasi *Investment Addition*
		Indeks *Index*	Jumlah *Total*	
1979	7.926.390	119,85%	9.499 778	2.512.245
1980	10.603.922	113,28%	12.012.123	11.037.351
1981	22 661.955	101,71%	23 049.474	5 340.422
1982	27.032.847	105,02%	28.389.896	5.340.422
1983	29.007.745	100%	29.007.745	617.843
Jumlah *Total*	97.232.859		101.959.016	17.507.961

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
Source : *Book of Repelita IV of Irian Jaya Province.*

Tabel / *Table II — 4a*

PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGARAN UNTUK SEKTOR—SEKTOR YANG TERPENTING DI IRIAN JAYA (PELITA I — III)
THE PROGRESS OF BUDGET FOR THE MOST IMPORTANT SECTORS IN IRIAN JAYA

(Dalam Jutaan rupiah) / *(in million rupiah)*

No	Sektor / *Sectors*	1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1978/1979	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983	1983/1984
1.	Perhubungan/*Communications*	1.182,3	1.597,5	1.505,3	1.576,6	1.448,9	2.625,5	6.366,6	10.163,06	9.035,7	6.781,1
2.	PUTL/ *Public Works and Electricity*	900	1.500	1.196,08	1.300	1.226	2.947,2	12.852,3	14.963,3	24.777,4	29.246,1
3.	Pertanian/*Agricultural*	443,2	395	352,9	441,1	445	879,8	1.452,6	2.168,3	3.139,9	5.123,8
4.	Pendidikan/*Education*	195	240,6	260	285	410	1.171,16	2.874,2	5.140,5	17.132,2	9.906,4
5.	Kesehatan/*Health*	105	105	105	100	100	627,9	1.031,7	2.131,7	2.644,7	2.341,5
6.	Dalam Negeri/*Internal Affairs*	252,6	484,2	460	464,7	765,2	622,2	2.343,9	1.929,03	2.862,9	3.052,3
7.	Tenaga Kerja, Trans. & Kop./ *Manpower, Transmigration and Cooperatives*	270	291,5	365,2	448	271,2	211,0	677,2	1.249,0	2.184,9	2.206,3
8.	Agama/*Religion*	30	30	25	50	50	2.685,06	3.896,06	9.779,9	16.656,8	17.875,5
9.	Perindustrian/*Industries*	25	50	16,7	35	35	92,7 *)	316,6 *)	297,2 *)	1.072,4 *)	300 *)

*) *Data tidak dilaporkan*
Sumber : Biro Keuangan Pemda Propinsi Irian Jaya
Source : *Financial Bureau of the Regional Secretariat Province of Irian Jaya.*

dana tersebut, sebesar Rp137.500.000,- dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan. Selebihnya dimanfaatkan untuk membiayai proyek untuk kepentingan rakyat dalam kaitannya pemberian lapangan kerja bagi sebanyak mungkin tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sesuai dengan pengarahan Mendagri yang dituangkan dalam suratnya tanggal 7 Pebruari 1978 No Kupd 1/1/33.

Untuk tahun anggaran 1983/1984 bantuan Inpres Dati I besarnya sama dengan tahun anggaran 1982/1938 yaitu sebesar Rp9.000.000.000,-, sedang pendapatan lainnya mengalami penurunan sebesar 2,77% atau sebesar Rp277.500.000,-. Hal tersebut dimungkinkan karena dikeluarkannya SKB Menteri Pertanian, Keuangan dan Perdagangan yang membatasi ekspor kayu gelondongan. Sedang untuk tahun anggaran 1986/1987 penerimaan pembangunan dari Inpres Dati I jumlahnya sebesar Rp10.000.000.000,- Pada tabel di bawah ini nampak bahwa bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Inpres di Irian Jaya menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Lihat Tabel II-5.

Khusus pelaksnaaan Inpres Bantuan Desa pada Pelita III, yaitu sejak tahun anggaran 1978/1979 - 1983/1984. Lihat Tabel II-6.

3. Pembangunan Desa

Permasalahan desa yang menonjol ialah adanya kesenjangan antara masyarakat daerah pantai dan pedalaman.

Daerah pantai di satu pihak dengan potensi yang ada, dengan penerapan teknologi tepat guna ditambah persediaannya berbagai faktor kemudahan antara lain prasarana dan sarana transportasi, menyebabkan daerah-daerah pantai lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah pedalaman. Demikian pula ditinjau dari segi keindahan yang lain Irian Jaya seolah-olah terbagi menjadi 2 bagian yang menyolok

For example by effectivating national resources for living environment and to grow up to the standard of living of the society in other parts of Irian Jaya so that there will be no more gaps between one district and the other.

If we look back to the development of Irian Jaya in the Pelita I period, at that time the condition was not very steady, but in Pelita II the socioeconomic condition of the people became relatively much better. Then based on conditions like that, the sectoral policy are directed to the development of the structure of communication, education, agriculture and health. And, although during Pelita I the placement of transmigration in Irian Jaya wasn't a main program yet, from that moment the programme has been pioneered and well planned.

2. Inpres Aid for Provincial Development and Other Inpres-Aids

The Inpres Aid Programmes was particularly aimed to support development activities in all regions of the Republic of Indonesia, considering the very poor amount of the sectoral funds allocated for the regional level. For fiscal year 1978/1979 the Province of Irian Jaya has received Inpres Aid for Provincial Development amounting to Rp2,000,000,000,- Of that amount Rp137,500,000,- was used for Roads and Bridges Rehabilitation Project while the rest was used for projects in pursuit of providing job opportunities to the people of the province.
This policy was based on the instruction of the Minister for Internal Affairs No Kupd 1/1/88 of February 7, 1978.

As for fiscal year 1983/1984 the sum of Inpres Aid provided to the Province of Irian Jaya was same with the amount provided in the previous year that is Rp 9,000,000,000 while other income received by the Province decreased by 2.77% or Rp 277,500,000,-. It is because of the policy taken by Ministers of Agriculture, Finance and Minister of Trade which limited log exports. In fiscal year 1986/1987 the Province of Irian Jaya received Rp 10,000,000,000,-.

Tabel / *Table II — 5*

DANA—DANA INPRES / *INPRES—AID FUNDS*

Dalam jutaan rupiah
In million rupiah

No Jenis Inpres / *Kinds of Inpres-Aid*	1979 1980	1980 1981	1981 1982	1982 1983	1983 1984
1. Inpres Dati I/ *Inpres Aid for Provincial Development Projects*	2.794	5.150	7.500	9.000	9.000
2. Inpres Dati II/ *Inpres Aid for District Development Projects*	735,7	1.068	1.537,9	1.742,1	1.780
3. Inpres SD/ *Inpres Aid for Primary School Development*	2.402,66	4.573	5.665,6	9.726,4	10.084,6
4. Inpres Kesehatan/ *Inpres Aid for Health Development*	345,7	503,04	1.128,2	1.327,2	1.084,6
5. Inpres Pasar/ *Inpres Aid for Marketing Facilities Development*	-	-	450	1.476,2	-
6. Inpres Penunjangan Jalan/ *Inpres Aid for Roads Rehabilitation*	1.037,7	1.413,5	2.098,5	2.343	2.780
7. Bantuan Desa/ *Aid for Rural Development*	401,4	669,0	996,0	1.269,2	1.418,5

Sumber : Biro Bangdes Pemda Dati I Propinsi Irian Jaya.
Source : The Rural Development Bureau of the Province of Irian Jaya.

Inpres Aid for Provincial Development Projects. Table II-5 shows that Inpres Aid provided by the National Government to the Province of Irian Jaya rises constantly. See Table II-5.

Table II-6 shows the Inpres-Aid for Rural Development during Pelita III from Fiscal year 1978/1979 to 1983/1984. See Table II - 6

3. Village Development

The main problems in village of this region are the gap between the coastal and hinterland societies. The coastal region has a good potential with the application of the effective technology and the provision of accommodations such as transportation facilities, so that this region develops faster than the hinterland region. In other words Irian Jaya can be devided into two great parts namely Northern Irian Jaya, which is relatively faster in its development efforts and Southern Irian Jaya which is relatively slower due to its remote location and sea lanes problems.

The big part of village population in Irian Jaya still lead a traditional way of life.

The limited protein and carbohydrate sources in village areas, cause the population of this area suffer malnutrition. Efforts to increase agricultural produce is hampered by physical, socio-cultural and socioeconomic condition of the people. Their life style and the natural condition constitute the predominant factors in the case of community health and malnutrition. They have almost no attention towards the settlement environment such as housing, sanitation, family toilets and animal husbandry system which result in many people suffering from various diseases such as worms, fumakosis, malaria, skin disease, and elephantiasis.

Tabel / *Table II — 6*

HASIL PELAKSANAAN INPRES BANTUAN DESA PELITA III DI PROPINSI IRIAN JAYA
RESULTS OF THE REALISATION OF INPRES—AID FOR RURAL DEVELOPMENT DURING PELITA III IN THE PROVINCE OF IRIAN JAYA

(dalam ribuah rupiah) / *(in thousand rupiah)*

No.	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Jumlah Desa *Number of Villages*	Prasarana *Infrastructure*					Sumber Biaya *Source of Funds*			Jumlah Biaya *Total Budget*	Keterangan *Remarks*
			PROD *Production*	PHB *Communication*	PMS *Marketing*	SOS *Social*	Jumlah Proyek *Number of Projects*	Swadaya *Self Capacity*	Pemda *Regional Government*	Pusat *National Government*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1979/1980	892	303	85	19	356	763	520.175,8	1.520	401.400	923.095,8	Selesai 100%
2.	1980/1981	892	239	65	26	1.179	1.509	680.504,5	150	669.000	1.349.654,5	Selesai 100%
3.	1981/1982	896	201	139	18	715	1.073	858.344	1.900	973.500	1.833.744	Selesai 100%
4.	1982/1983	896	145	61	6	1.117	1.329	760.720,2	-	851.750	1.612.470,2	Selesai 100%
5.	1983/1984	901	80	45	1	352	478	471.560	-	391.200	862.760	Selesai 100%
	Jumlah / Total		968	395	70	3.719	5.152	3.291.304,5	3.570	3.286.850	6.581.724,5	

Sumber : Biro Bangdes Propinsi Irian Jaya.
The Rural Development Bureau of the Province of Irian Jaya.
Keterangan : PROD = Produksi; PHB = Perhubungan; PMS = Pemasaran, SOS = Sosial.

yaitu : Irian Jaya bagian Utara yang relatif lebih cepat tingkat pertumbuhannya, dan Irian Jaya bagian Selatan yang relatif tertinggal berhubung faktor keterpencilan yang berkaitan dengan masalah jalur-jalur lalu lintas laut.

Keadaan penduduk pedesaan di Irian Jaya sebagian besar bersifat tradisional.

Terbatasnya sumber protein dan karbohidrat di daerah pedesaan menyebabkan diantara penduduk menderita kekurangan gizi. Usaha-usaha untuk menaikkan produksi pertanian terhambat oleh kondisi fisik, sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat. Cara hidup serta kondisi alam merupakan faktor dominan dalam hubungannya dengan kesehatan disamping masalah gizi masyarakat pedesan kurang memperhatikan lingkungan pemukiman, baik perumahan, sanitasi, jamban-jamban keluarga yang kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan maupun pelepasan hewan-hewan peliharaan yang dapat menghantar atau merupakan bagian sirklus dari penyebaran penyakit. Sehingga banyak masyarakat pedesaan yang menderita bermacam-macam sakit cacingan, mengidap sakit saluran pernapasan (fumakosis), malaria, sakit kulit, bahkan banyak juga yang terkena penyakit kaki gajah (elephontiasis).

Pemakaian kayu per kapita penduduk daerah pedesaan terutama masyarakat pedalaman sangat tinggi (7,9 m3/kapita/tahun). Pemakaian kayu yang sedemikian tinggi tersebut sangat sukar dicegah, karena selain untuk keperluan memasak juga untuk perapian untuk melawan hawa dingin. Seperti daerah-daerah dingin di Kabupaten Jayawijaya dan

Consumption of wood per capita in villages areas particularly in hinterland areas is very high, 7.9 cubic metres per capita annually. The high consumption of wood is very difficult to be prevented, because besides for cooking it also used for heating during the cold weather. Like in the cold areas such as the Jayawijaya and Panial districts, the use of fireplace lasts more than all night, so that tree felling and removal cannot be avoided. Finally, the land becomes critical and unfertile.

Many school age children cannot enjoy education due to the small number of teachers who wish to be placed in remote areas. There also exists droup-out youths and unemployment group, because they have no vocational skills to manage the potentials of their villages.

Departing from these problems, the First Regional Government of Irian Jaya (Province) strives to improve village areas seriously. Up to the end of Pelita III, the government has developed village areas in various sectors. Development in the health sector covered provision of family toilets, fresh water through manual water pumps, water wells, the eradication and prevention of disease in village community, provision of healt and environment information, Public Health Centres and Sub Public Health Centres, flighting doctors to overcome the shortage of medical personnel and nutrition improvement. In the field of village and social development, efforts have been done to improve the isolated tribes. Development in the sector of Agriculture has been carried out through the provision of technical information on agriculture, and that culture, and that of seeds or seedlings. Development in the sector of communications covered the construction of new roads to link the isolated areas which

Kabupaten Paniai perapian sampai lebih dari sepanjang malam, sehingga penebangan-penebagan kayu, penggundulan hutan tak dapat dihindarkan lagi. Sebagai akibat lanjutan terjadilah tanah-tanah kritis, atau pun tanah menjadi kurus akibat pencucian unsur haranya oleh hujan.

Anak usia sekolah banyak yang tidak mengenyam pendidikan karena kekurangan guru-guru sekolah yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Adanya pemuda putus sekolah dan kelompok penganggur, sebab tidak memiliki ketrampilan untuk mengolah potensi yang ada di desanya.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan inilah Pemda Tingkat I Irian Jaya berusaha untuk membangun daerah pedesaan secara serius. Sampai akhir Pelita III Pemerintah banyak membangun daerah pedesaan di berbagai sektor. Di sektor Kesehatan telah dibangun jamban-jamban keluarga, pengadaan air bersih melalui pembangunan-pembangunan pompa air, sumur-sumur, pemberantasan dan pencegahan penyakit-penyakit yang ada di masyarakat pedesaan, penyuluhan-penyuluhan kesehatan dan lingkungan, perbaikan gizi masyarakat, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta diperlukan tenaga dokter terbang untuk mengatasi daerah yang kekurangan tenaga medis. Di sektor Pembangunan Desa dan Sosial telah dilaksanakan pembinaan masyarakat terasing. Di sektor Pertanian pun telah dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan pertanian, pengadaan bibit-bibit demonstrasi ploting dan demonstrasi pond. Begitu pula di bidang perhubungan, telah dibuat jalan rintis tembus guna isolasi daerah pedesaan/pedalaman, baik dengan cara padat karya dan juga bermaksud untuk menambah pendapatan masyarakat ataupun dengan program-program lain. Pembangunan Dermaga-dermaga Perintis, pengadaan perahu-perahu dan Ferry serta pembukaan jalur-jalur penerbangan perintis dan pembangunan lapangan terbang dan rehabilitasi lapangan terbang perintis, semua itu dimaksudkan dalam usaha memecahkan masalah isolasi daerah pedalaman/terpencil. Untuk mempertinggi cara hidup dan cara bercocok tanah, telah dilaksanakan program Transmigrasi baik secara murni maupun secara campuran. Dengan demikian dimaksudkan proses alih teknologi dapat berjalan dengan baik.

Dalam kegiatan Pembangunan Desa sampai dengan 1983 telah dapat dibentuk desa Swadaya sejumlah 772 buah, desa swakarya 110 buah dan desa swasembada 19 buah. Jadi jumlah seluruhnya di Irian Jaya ada 901 buah desa. Kemudian sebagai hasil dari berbagai usaha untuk penataan desa, pemekaran, dan penyatuan desa-desa yang satu sama lain saling memencil perkembangan bentuk desa selama ini banyak berubah. Apalagi usaha-uaha program transmigrasi yang berhasil banyak pula memberi pengaruh kepada penduduk asli untuk mulai hidup secara lebih modern. Berdasarkan angka statistik yang bersumber dari Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Irian Jaya pada tahun 1984 jumlah desa bertambah menjadi 905 buah dengan klasifikasi : 776 desa swadaya, 110 desa swakarya dan 19 buah desa swasembada. Kemudian dengan jumlah desa yang tetap sama desa yang berkwalifikasi swadaya pada tahun 1985 menjadi 728, desa swakarya 148 dan desa swasembada menjadi 29 buah. Lihat Tabel II-7.

is done by Labour Intensive Project in order to increase people's income. In addition, efforts in this sector engages the development of quays for pioneer shipping; provision of ferries and vessels, and to open new airway networks for pioneer airlines and the construction and rehabilitation of pioneer air strips. These efforts are aimed at solving problems of the transportation to and from the isolated areas.

To improve the living standard and farming practice the government has carried out transmigration programmes by the governmental and private sector. By this way the process of transfer of technology can run smoothly.

In the field of village development, up to 1983, 772 Swadaya villages, 110 Swakarya villages and 19 Swasembada villages had been established which add to the total number of villages in Irian Jaya to 901 units. The achievement of village development through village design, expansion and unification showed a good result. Besides, the achievement of transmigration projects has given a positive impact on the indigenous people to lead a modern way of life. According to date of the Directorate of Village Development of the Province of Irian Jaya in 1984, the total number of villages increased to 905 units consisting of 776 swadaya, 110 swakarya and 19 swasembada villages. Furthermore the swadaya village in 1985 increased to 728, the swakarya village to 148 and 29 swasembada villages. See Table II-7.

The problem faced in developing village areas is the scattered settlement pattern and being isolated from communication network. The socio-economy and socio-culture level in this region is relatively low among other things relating to education, health, and the awareness of law and religion. Such condition create low productivity and little participation in the development. The many tribes and dialects and the stiff adherence to the various traditions make the local people difficult to communicate. It also makes it difficult to develop and promote this region promote this region. The limited government apparatuses and the lack of infrastructure and governmental facilities in sub-districts and villages also adds to the problem.

Viewed from the economic potentials the rural areas are relatively feasible for development in the agricultural field but the largest part of the population live at critical areas and where food stuff is scarce. They have very little skills due to the traditional pattern by which the people live, which makes it difficult for them to make their land to be more productive. This situation frequently causes famine and natural disaster. Efforts to resettle the people to more fertile areas is hampered by tradition and beliefs of the ancestors in the new land. The realisation of the village development aid by districts during 1984/1985 showed an increase although the state budget at that time was rather limited. The amount allocated to 905 villages in 1984 was Rp 1.39 billion and in 1985 it increased to Rp 1.44 billion. For instance Merauke with 182 villages obtained a budget amounting to Rp 278 million, whereas Yapen Waropen with 48 villages received a budget amounting to Rp 77 million. See Table II-8.

The condition of towns in Irian Jaya still depends on communication with other towns outside Irian Jaya. It means that communication between towns

Tabel / *Table II — 7*

PERKEMBANGAN JUMLAH DESA DI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA MENURUT KLASIFIKASI DESA SWADAYA, SWAKARYA, DAN DESA SWASEMBADA TAHUN 1983 S/D 1985

DEVELOPMENT OF VILLAGES IN THE PROVINCE OF IRIAN JAYA BY VILLAGE CLASSIFICATION UNDER DEVELOP—DEVELOPING AND DEVELOP VILLAGES DURING 1983 - 1985

No.	Dati II *Districts*	Klasifikasi *Classification*											
		Tahun 1983				Tahun 1984				Tahun 1985			
		Desa/Kel. *Village*	Swadaya *UDV*	Swakarya *DV*	Swasembada *PdV*	Desa/Kel. *Village*	Swadaya *UDV*	Swakarya *DV*	Swasembada *DdV*	Desa/Kel. *Village*	Swadaya *UDV*	Swakarya *DV*	Swasembada *UDV*
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Merauke	182	165	17	-	182	165	17	-	182	157	25	-
2.	Jayawijaya	112	111	-	1	112	111	-	1	112	109	2	1
3.	Jayapura	120	77	31	12	120	77	31	12	120	75	30	15
4.	Paniai	141	124	17	-	141	124	17	-	131	113	25	3
5.	Fak-Fak	54	35	18	1	54	35	18	1	54	28	22	4
6.	Sorong	109	97	8	4	109	97	8	4	109	97	8	4
7.	Manokwari	68	60	7	1	68	60	7	1	68	59	8	1
8.	Yapen Waropen	44	42	2	-	48	46	2	-	48	39	9	-
9.	Biak Numfor	71	61	10	-	71	61	10	-	71	51	19	1
	Irian Jaya	901	772	110	19	905	776	110	19	905	728	148	29

Sumber Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1983, 1984 dan 1985.
Source : Irian Jaya in Figures 1983, 1984 and 1985

*	***UDV***	=	***Under***	***developed***	***Villages***
**	***DV***	=		***Developing***	***Villages***
***	***DdV***	=		***Developed***	***Villages***

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun daerah pedesaan adalah Pola Pemukiman yang terpencar pencar dan terisolir jauh dari jaringan atau jangkauan komunikasi pemerintahan dan pembangunan akibat kurangnya sarana dan prasarana perhubungan. Ditinjau dari keadaan sosial ekonomi dan budaya menunjukkan tingkat yang relatif masih rendah antara lain menyangkut pendidikan, kesehatan, kesadaran hukum dan kesadaran beragama. Keadaan yang demikian menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas masyarakat serta kurangnya peranserta dalam pembangunan. Dengan banyaknya suku dan bahasa serta ketatnya mereka memegang adat istiadat sangat menyulitkan mereka untuk saling berkomunikasi. Hal ini akan menyulitkan dalam membina dan membangun. Dilain pihak memang juga sangat terbatasnya aparat Pemerintah serta kurangnya prasarana dan sarana fisik Pemerintahan di Kecamatan dan Pedesaan-pedesaan pada umumnya. Ditinjau dari potensi ekonomi daerah-daerah pedesaan mempunyai potensi yang cukup besar untuk membangun sektor pertanian tetapi sebagian besar penduduk justru bermukim di daerah-daerah yang kritis, dan rawan pangan dengan ketrampilan yang rendah dan pola tradisional yang masih melekat pada masyarakat, sulit untuk mengolah tanah menjadi lebih produktif. Keadaan yang demikian sering menimbulkan bencana kelaparan dan bencana alam. Pemindahan penduduk ke lokasi yang subur, terbentuk pada masalah adat dan kepercayaan terhadap tanah leluhur lyang harus ditempatinya.

Pelaksanaan bantuan pembangunan desa menurut Kabupaten antara tahun 1984 - 1985 masih ada peningkatan meskipun kemampuan dan dari pusat sudah mulai terbatas. Kalau tahun 1984 jumlah bantuan Rp1,39 milyar ternyata tahun 1985 menjadi 1,44 milyar untuk 905 desa. Merauke misalnya, pada tahun 1985 mendapatkan bantuan sebesar Rp278 juta untuk 182 desa. Sedangkan Yapen Waropen, yang merupaan Kabupaten yang memiliki 48 desa (paling sedikit) pada tahun yang sama mendapatkan bantuan sebesar Rp77 juta. Lihat Tabel II-8.

Keadaan kota-kota di Irian Jaya juga masih sangat tergantung pada hubungannya dengan kota-kota di luar daerah Irian Jaya. Artinya belum nampak jelas keterkaitan antara kota dengan wilayah pendukungnya. Sebagian besar kota-kota di Irian Jaya masih terbatas pada kaitan karena fungsinya sebagai ibukota Propinsi dan Kabupaten. Begitu juga kota kecamatan yang dapat berkembang sesuai dengan fungsi dan daya layannya terutama kepada daerah pedesaan sebagai daerah belakang masih sangat sedikit. Tetapi dengan adanya program transmigrasi sedikit demi sedikit fungsi dan wajah kota mulai menampakkan dirinya, disamping itu disebabkan pula oleh berbagai kegiatan komersial yang ikut menyemarakkan kehidupan kota.

Sampai dengan akhir Pelita III, telah banyak dibangun baik sarana/prasarana maupun fasilitas-fasilitas, untuk menunjang pembangunan perkotaan. Seperti pembangunan jalan dan jembatan, perumahan dinas, perbaikan rumah perkotaan termasuk daerah-daerah alum di Jayapura, Biak, Manokwari dan Merauke. Pembangunan, peningkatan/rehabilitasi jaringan air bersih menjadi 20 liter per detik. Untuk mengatasi kesulitan perumahan di Jayapura yang semakin berkembang telah dibangun perumahan oleh Perumnas, dalam Pelita III yang lalu sejumlah 685 unit.

Menginjak pelaksanaan Pelita IV, pembangunan kota terus diupayakan peningkatannya. Membantu masyarakat yang kurang mampu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota melalui pemberian kredit pemilikikan Rumah melalui BTN juga merupakan upaya nyata yang terus dilaksanakan. Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan rumah melalui Perumnas sebanyak 2.000 unit. Untuk menjamin terwujudnya keserasian, keindahan dan kenyamanan kota, dibuat tata ruang 9 kota/lokasi. Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan/masyarakat akan dibangun/direhabilitasi jaringan ari bersih di sepuluh kota dengan kapasitas 40 liter per detik serta di 39 kota Kecamatan. Disamping itu juga akan dibangun drainage, asseinering di 9 kota Kabupaten. Khusus untuk kota Merauke yang selalu mengalami banjir secara periodik akan dibangun pintu air serta rehabilitasi saluran dilanjutkan program Perintis, Perbaikan lingkungan Perumahan kota di 11 kota.

4. Keagrariaan

Kegiatan Keagrariaan di Irian Jaya, sesuai dengan lingkup kerjanya, dimaksudkan untuk menunjang program transmigrasi, Prona dan Tata Guna Tanah. Dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertahanan, Pemerintah Daerah juga terus mengadakan penelitian hukum adat atas tanah dalam kaitannya dengan UUPA.

Untuk mewujudkan administrasi pertanahan, Pemerintah Daerah berusaha untuk terus meningkatkan upaya pendaftaran tanah. Baik tanah yang dikuasai oleh Pemerintah, badan usaha maupun perorangan.

Tabel / *Table II — 8*

REALISASI PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI PROPINSI IRIAN JAYA PER KABUPATEN TAHUN 1984 DAN 1985
REALIZATION OF VILLAGE DEVELOPMENT AID IN IRIAN JAYA PROVINCE, 1984 - 1985

No. Kabupaten *Districts*	Jumlah / *Total*			
	Bantuan (rupiah) '84 *Aid*	Bantuan (rupiah) '85 *Aid*	Desa 1984 *Village*	Desa 1985 *Village*
1 2	3	4	5	6
1. Merauke	263.600.000	278.100.000	182	182
2. Jayawijaya	166.800.000	174.300.000	112	112
3. Jayapura	196.300.000	200.600.000	120	120
4. Paniai	210.800.000	221.200.000	141	141
5. Fak-Fak	88.100.000	90.200.000	54	54
6. Sorong	170.700.000	175.200.000	109	109
7. Manokwari	111.800.000	114.900.000	68	68
8. Yapen Waropen	77.250.000	77.050.000	48	48
9. Biak Numfor	109.350.000	113.250.000	71	71
Irian Jaya	1.394.700.000	144.800.000	905	905

Sumber : Direktorat PMD Propinsi Irian Jaya.
Source : Directorate of Village's people Development in Irian Jaya.

and their supporting areas are not smooth. Communication between the big towns are restricted only to their function as the provincial and district capital towns. Links between subdistrict towns and village areas are also minimumly. The implementation of transmigration programmes in this region affects the development of towns.

Up to the end of Pelita III, the government had developed various infrastructure and facilities to back up the development of towns covering the construction of roads and bridges, housing complex for officials, the rehabilitation of urban housing included slum areas in Jayapura, Biak, Manokwari and Merauke. The construction and rehabilitation of fresh water networks reached 20 litres per second. To overcome housing problems in Jayapura, during Pelita III, 685 units houses had been built. Entering the Pelita IV, town development is to be continuously enhanced. Housing development is aimed at helping the low income people to gain houses through a Home Ownership Credit extended by the State Savings Bank (BTN) and for this purpose the regional administration plans to build 2,000 units of houses. To secure harmony, aesthetics and comfortability of towns, the government had designed the lay out of nine towns. A programme to improve health and environment has been designed by the government to develop and rehabilitate fresh water networks in ten towns with a capacity of 40 litres per second in 39 sub-districts, besides drainage and zoning in nine towns. To prevent river overflow in Merauke, watergates and drainages had been constructed and rehabilitated. Environment improvements had been also carried out in 11 towns.

4. Agrarian Affairs

Activities in the field of agriculture in Irian Jaya are aimed at supporting the transmigration programme, the agrarian national project (prona) and Land Use. In the framework of realising land order the regional government continuously observed the local customary law on land relating to the agrarian Basic Act (UUPA).
To realise a good agrarian administration, regional government made endeavours to continuously increase activities of land registration both the authorisation of government corporation and that of individuals. Besides, efforts are directed to enhance public service, skilled and capable personnel. Relating to this activities, inventory efforts continue to be increased conceptionally.

In line with the development of border areas and remote areas, the regional government have also made efforts to gain income in the agrarian field covering land ownership, land exploitation and land preparation for development projects.

According to data from the Agrarian Directorate of the Irian Jaya Province, the number of land right certificates for Bulding Right (HGB) reached 820 in 1985/1986 whereas certificates on usufruct (HP) and Proprietary Right were 178 and 200 respectively. See Table II-9.

During 1985/1986, the Districts of Jayapura, Sorong, Merauke, Manokwari and Biak issued the most certificates.

Furthermore, the number of applications for certificates covering Proprietary Right, Building Right and usufructs was respectively 328, 982 and 201.

5. Family Welfare Promotion (PKK)

To institutionalise PKK among the Irian Jaya people, especially those in remote areas, skilled and dedicated personnel are needed especially Women

Juga peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga teknis dan lain-lain. Dalam kaitan inilah kegiatan inventarisasi terus diupayakan dan dilaksanakan secara konsepsional.

Dalam hubungannya dengan pengembangan daerah perbatasan dan daerah pedalaman, Pemerintah Daerah juga mengusahakan pendapatan pertanahan. Meliputi kegiatan penggunaan tanah, pemilikan serta usaha penggunaan tanah, maupun penyediaan tanah bagi proyek-proyek pembangunan.

Menurut catatan di Direktorat Agraria Propinsi Irian Jaya, jumlah sertifikat Hak Atas Tanah untuk jenis tanah Hak Guna Bangunan (HGB) pada tahun 1985/1986 mencapai 820 buah. Sedangkan jenis sertifikat Hak Pakai (HP) dan Hak Milik (HM) berturut-turut adalah 178 buah dan 200 buah. Lihat Tabel II-9.

Tabel / *Table II — 9*

JUMLAH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PER KABUPATEN 1985/1986
THE NUMBER OF CERTIFICATES OF LAND RIGHTS, BY DISTRICT 1985/1986

No	Kabupaten *Districts*	Jenis Sertifikat *Certificate*		
		HM *HM*	HGB *HGB*	HP *HP*
1.	Merauke	26	87	31
2.	Javawijaya	3	12	9
3.	Jayapura	115	175	97
4.	Paniai	2	98	2
5.	Fak-Fak	-	-	-
6.	Sorong	-	235	16
7.	Manokwari	12	71	16
8.	Yapen Waropen	13	26	7
9.	Biak Numfor	5	56	12
	Irian Java	200	820	178

Sumber : Dit Agraria Propinsi Irian Jaya
Source : Directorate of Agrarian Affairs of Irian Jaya Province.

Pada tahun 1985/1986 daerah yang paling banyak mengeluarkan sertifikat ialah Jayapura, Sorong, Merauke, Manokwari, dan Biak.

Jika di atas telah dijelaskan mengenai jumlah sertifikat atas tanah, maka di bawah ini dipaparkan mengenai jumlah permohonan yang masuk atas Pengurusan Hak Tanah di Propinsi Irian Jaya pada tahun 1985. Untuk Tanah Hak milik di seluruh Propinsi Irian Jaya jumlah pemohon yang masuk jumlahnya mencapai 328 buah, sedangkan jenis HGB dan HP berturut-turut mencapai 982 dan 201 buah.

5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Untuk melembagakan PKK di tengah masyarakat Irian Jaya, khususnya di daerah pedalaman, nampaknya membutuhkan tenaga dan kader-kader terampil dan militan. Khususnya tenaga wanita untuk menerobos pintu keterbelakangan dan keterkaitan adat istiadat yang kurang menguntungkan. Untuk itulah maka 10 Program Pokok PKK merupakan satu-satunya motor penggerak yang diharapkan mampu menembus keadaan tersebut.

Dalam rangkaian pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, Irian Jaya lebih mendahulukan Pendidikan dan Ketrampilan bagi ibu-ibu Penggerak PKK. Baik mereka yang berada di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Desa. Tentu saja pelaksanaan kegiatannya juga disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta dana yang ada. Untuk tahun anggaran 1985/1986 misalnya beberapa kegiatan telah berhasil dilaksanakan. Misalnya latihan Pengurus Tim Penggerak PKK sekaligus menjadi kader PKK di 9 Kabupaten meliputi 327 orang.

Lomba 10 Program Pokok PKK dan Program Terpadu P2WKSS di 9 Kabupaten, yang bertujuan selain menentukan pemenang, juga mempunyai dampak positif terhadap tingkat perkembangan pelaksanaan kegiatan PKK secara serempak mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai ke desa-desa.

Supervisi oleh Ibu-Ibu Tim Penggerak PKK Propinsi Irian Jaya keseluruhan Kabupaten di Irian Jaya sekaligus melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PKK yang dilaksanakan di desa-desa dengan dana Ganjaran Tim Penggerak PKK Propinsi Irian Jaya.

Workers, to penetrate the backwardness of this tribe due to unpractical way of life.

The ten programmes of PKK will motivate the tribal people to change their way of life. In the framework of implementing the ten Programmes of PKK, in Irian Jaya it is more focussed on providing education and vocational training to women motivators of PKK in Province, Districts, Subdistricts as well as those in villages.
The implementation of the activities are to be in comformity with the condition and available funds. For instance, for the fiscal year of 1985/1986, activities which had been carried out successfully covered training courses for 327 motivators of PKK in 9 district.

Contests of the ten mainprogrammes of PKK and the Promotion of Women's role for a Healthy and Prosperous Family (P2WKSS) in 9 districts had a positive impact on the implementation of PKK activities in districts, subdistricts and villages.

Supervision by a motivator team of PKK is aimed at monitoring and evaluating activities of PKK in villages using funds of Ganjaran Tim Penggerak PKK Irian Jaya.

The activities included a comparative study to the Capital City of Jakarta and meeting with Madame Soeharto on February 3, 1986 at the Park of Indonesia in Miniature in the Sasono Langeng Budoyo Pavillion, at the invitation of the first Lady.

In carrying out these activities, the motivator team of PKK not only uses funds from the integrated programme of P2WKSS, carried out by institutions relating to PKK activities, but also in accordance with the working mechanism of the Home Affairs Department so that the Team is able to co-operate with the Directorate of Village Development of Irian Jaya both in the planning and implementation of PKK programmes. In 1985/1986, all activities of the 10 programmes of PKK could be financed by the Provincial Budget on PKK totaling Rp 30,000,000 managed by the Directorate of Village Development of Irian Jaya and the Insentive Funds totaling Rp 20,000,000.00 managed by the motivator team of PKK in Irian Jaya Province.

If compared with the volume of activities during one fiscal year, it is obvious that the funds allocated to PKK is too small. But with the good cooperation of the Directorate of Village Development, activities of PKK can be carried out well.

Mengadakan Study Perbandingan ke DKI Jakarta memenuhi Undangan Ibu Tien Soeharto dalam rangka pertemuan di Taman Mini (Sasono Langen Budoyo) pada tanggal 3 Februari 1986, dengan Dana Ganjaran dan bantuan Pemda Tk. I Irian Jaya.

Dalam melaksanakan kegiatan ini bagi Tim Penggerak PKK selain dari Dana Sektoral Yaitu Program Terpadu P2WKSS yang dilaksanakan oleh masing-masing Instansi yang ada kaitannya dengan PKK, juga sesuai dengan mekanisme kerja Departemen Dalam Negeri maka Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan programmnya melalui jalur kerjasama dengan Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati I Irian Jaya baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan program PKK.

Dengan demikian maka dalam tahun anggaran 1985/1986 semua kegiatan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dapat ditunjang dengan dana yang bersumber dari DIPDA PKK sebesar Rp30.000.000,- yang dikelola oleh Dit. Bangdes Propinsi Dati I Irian Jaya dan dana Ganjaran sebesar Rp20.000.000,- dikelola oleh Tim Penggerak PKK Propinsi Dati I Irian Jaya.

Apabila kita bandingkan volume kegiatan PKK yang dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yang tersedia sangat minim sekali. Namun atas kerjasama yang baik antara Tim Penggerak PKK dengan Dit Bangdes Propinsi Dati I Irian Jaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Dan diharapkan untuk tahun-tahun mendatang agar dananya dapat ditingkatkan sesuai dengan semakin berkembangnya kegiatan PKK di daerah Irian Jaya.

B A B / *CHAPTER III*

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI / *ECONOMIC DEVELOPMENT*

PEMBANGUNAN bidang ekonomi di Irian Jaya pada awal Pelita I belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih dipengaruhi oleh keadaan pada masa pra Pelita dimana pada tahun 1963 - 1969 dikenal sebagai masa persiapan untuk melaksanakan PEPERA (Pengumpulan Pendapatan Rakyat). Dalam periode ini pelaksanaan integrasi ekonomi Irian Barat ke dalam sistem perekonomian Indonesia belum mendapat prioritas. Dengan PEPERA sebagai wahananya dan bahkan untuk kepentingan integrasi politis, maka berbagai kebijaksanaan khusus dalam bidang ekonomi dan moneter diterapkan di Irian Jaya. Sebagai misal pada masa sebelum tahun 1963 tingkat upah di Irian Barat jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan tingkat bunga jauh lebih rendah. Harga-harga barang dan jasa berbeda. Dalam periode tersebut tingkat inflasi di Indonesia sangat tinggi. Sebagai akibat kebebasan arus model dan faktor-faktor produksi lainnya antara Irian Jaya dengan Indonesia terjadilah arus ke luar modal dan sangat sedikit yang tertanam di Irian Jaya. Akibat lebih jauhnya ialah bentuk dan struktur ekonomi daerah tersebut berubah. Langkah-langkah ke arah integrasi ekonomi masih tertunda mengingat kondisi daerah. Sampai dengan akhir tahun 1972 misalnya tarif bea masuk khusus masih diberlakukan di Irian Jaya waktu itu bernama Irian Barat.

Penyerahan Irian Jaya kepada Republik Indonesia diikuti oleh keluarnya modal-modal asing yang ada, tenaga-tenaga asing yang trampil juga ikut keluar dari Irian Jaya. Dan yang tinggal hanya para rokhaniawan serta saudagar-saudagar Cina. Kegiatan pelayaran pantai yang sampai dengan tahun 1962 berjalan baik dan lancar oleh karena subsidi Pemerintah berhenti. Sudah barang tentu ini menimbulkan masalah dalam perhubungan antar tempat dan kegiatan perekonomian daerah yang sesungguhnya telah mulai menjadi money economics (ekonomi keuangan). Perdagangan luar negeri (Singapura) juga ikut terhenti karena suasana konfrontasi dengan Malaysia/Singapura pada zaman DWIKORA.

Pada tahun 1963 mata uang "Irian Barat Rupiah" (IBRP) diedarkan. Nilai tukar (paritas) daripada IBRP sama dengan Gulden yang terdahulu. Oleh karena perdagangan bebas antara Irian Jaya dengan Indonesia serta pengaruh Inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1964 - 1965 maka timbullah perbedaan yang besar terhadap kurs resmi antara IBRP dan RP. Tahun 1963 kurs antara IBRP 1 ialah Rp62,5 dan tahun 1965 menjadi Rp1.000,-. Tapi pada tahun 1971 kembali turun menjadi Rp18,90.

Harga-harga barang di Jakarta naik 10 - 20 kali dari Irian Barat, dan akibatnya terjadilah arus keluar dari Irian Barat barang-barang bergerak, alat-alat modal ke wilayah lain di Indonesia.

Guna menghindari keadaan perekonomian yang tidak menguntungkan sekitar tahun 1966 dan 1967, usaha peniadaan IBRP ditangguhkan dan bagi para importir Indonesia harus menyediakan devisa guna membeli IBRP serta ijin khusus bagi perdagangan antar pulau.

Untuk mengatasi masalah penurunan tingkat kemakmuran taraf hidup di kota-kota maka dilakukan operasi pengadaan bahan makanan dan kebutuhan darurat lainnya dalam tahun 1966. Dengan adanya devaluasi nilai RP terhadap IBRP pada tahun 1967 dan 1970, daya beli kembali pulih, pembatasan-pembatasan dalam bidang perdagangan antar pulau dihapus, tarif bea masuk diturunkan lagi.

Setelah tahun 1970 sebagai proses integrasi secara utuh daripada perekonomian Irian Jaya ke perekonomian nasional Indonesia baru dapat dilaksanakan setelah PEPERA selesai dan bersamaan dengan dilaksanakannya Repelita I. Berbagai macam kebijaksanaan khusus baik dalam bidang moneter, perdagangan, tarif dan lain-lain satu demi satu dihapuskan demi untuk mencapai suatu kesatuan ekonomi di wilayah Indonesia. Untuk membuat agar integrasi ekonomi dimaksud berjalan dengan baik di Irian Jaya maka berbagai lembaga keuangan seperti Bank, Asuransi, lembaga pembiayaan dilengkapi.

Pada awal periode ini dilaksanakan suatu **crash program** untuk merehabilitasi prasarana di berbagai sektor sebagai landasan pembangunan berikut yaitu program FUNDWI (Foundation of United Nation West of Irian). Hasil survey FUNDWI tahun 1967, maka **The Irian Java Joint Development Foundation** didirikan. Baik UNDP maupun Pemerintah sama-sama menyediakan penyertaan US$ 4 juta. Lembaga ini pada akhirnya merupakan sumber pendanaan pembangunan beberapa proyek, tapi dalam tahun-tahun terakhir nampaknya, missinya sebagai "Agent of Development" semakin kabur.

ECONOMIC development in Irian Barat (the name of this province at that time, meaning West Irian) at the beginning of Pelita I was not running well due to the condition of pre-Pelita when during 1963-1969 it was the period of the Act of Free Choice/Referendum (PEPERA) by the people of Irian Barat. At this period the implementation of economic development in West Irian had no priority. By means of PEPERA and for political interest, various policies in the sector of economy and moneter had been applied in Irian Barat. For instance, before 1963, wages in Irian Barat was higher than that of the other regions in Indonesia, whereas the rate of Bank interest was lower. Prices of goods and services were also different. At this period, Indonesia's inflation rate was very high. As a result of a free flow of capital and other production factors between West Irian and other provinces of Indonesia a rapid flow of capital from Irian Barat occured at that time leaving only a small investment in this region. This changed the economic pattern and structure in Irian Barat but steps towards and economic integration was posponed due to the regional condition at that moment. Up to the end of 1972, the specific import tax tariff was still effective in Irian Jaya, which was still called Irian Barat.

The transfer of Irian Barat to the Republic of Indonesia was followed by the with drawals of the existing foreign investment, and departures of foreign experts from Irian Barat, leaving evangelists and Chinese merchants who chose to stay in this region. Transport activities at the coastal areas also ceased operations. Which caused problems in communications and further effected the economic and monetary field. Foreign trade between Irian Barat and Singapore was discontinued due to the severance of diplomatic relations between Malaysia/Singapore and Indonesia in the DWIKORA (The People's Twofold Command) period.

As of 1963, the Irian Barat Rupiah (IBRP) -- West Irian's new currency -- was issued and brought into circulation. The IBRP was equivalent to the Dutch Gulden.
Because of the free trade between Irian Barat and other provinces of Indonesia and the highest inflation rate of the Rupiah during 1964 - 1965, a big difference in value occured between IBRP and the Rupiah. In 1963 the rate of exchange of IBRP 1 - was Rp62.5 and in 1965 it became Rp1,000,- but in 1971 it declined to Rp18.90.

Prices of goods in Jakarta increased ten to twenty times compared to that of West Irian so that many merchandise from Irian Jaya flew to other regions of Indonesia.

To avoid the unfavourable economic condition during 1966 and 1967, efforts to amend IBRP was delayed and Indonesian importers would obtain IBRP only in exchanges of foreign currency and a special permit for inter-island trade.

In 1966, to overcome the poor conditions of the people in cities, the government distributed rations of food stuffs and other emergency needs. The devaluation of Rp towards IBRP in 1967 and 1970, had recovered the purchasing power, amended inter-insular trade limination and cut off import duties.

The total integrated process of economy in Irian Jaya to the National economy can only be carried out in 1970 after the PEPERA period which is the same period of Repelita I. Various special policies covering the fields of monetary, trade, tariff and others had been revoked one by one to reach 5 a national integrated economy in Indonesia. For the purpose of a smooth process of economic integration in Irian Jaya, various monetary institutions such as Banks Insurance Companies and other financial institutions were established.

At the beginning of the period, the government carried out a crash programme to rehabilitate the infrastructures of various sectors as a foundation for the following development namely the programme of Foundation of United Nations West of Irian (FUNDWI). As the result of a survey by FUNDWI in 1967, the government had established the Irian Jaya Joint Development Foundation.

Both UNDP and the Indonesian Government provided $US 4.00 million. This institution became the financial source of several development projects but later on its function as Agent of Development became indistrict.

The follow up of the economic integration was the implementation of all national policies in Irian Jaya although with some modifications for effective results.

The economic progress in Irian Jaya was indicated by the development of modern sectors especially in the potential areas however, the positive impact

Sebagai tindak lanjut daripada integrasi ekonomi maka segenap kebijaksanaan nasional dilaksanakan di Irian Jaya, sekaligus dengan berbagai tindakan modifikasi dengan tujuan agar efektifitas/target fungsinya dapat dicapai.

Kemajuan ekonomi Irian Jaya ditandai oleh berkembangnya sektor-sektor modern terutama di daerah-daerah potensial dan telah ada dampak positifnya, namun ekonomi kantong di daerah pedalaman yaitu sekitar pegunungan tengah Irian Jaya masih memberikan corak kehidupan ekonomi modern belum dapat menyentuh segenap wilayah Irian Jaya.

Keadaan pembangunan di Propinsi Dati I Irian Jaya dalam Pelita III dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 1983 menurut perincian lapangan usaha cukup baik dan senantiasa mengalami peningkatan, keadaan ini berlanjut hingga pada awal Pelita IV (1984).

Pada tahun 1984 keadaan perkembangan perekonomian di Propinsi Irian Jaya menggambarkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menempati urutan pertama sumbangannya terhadap pembangunan daerah ini, yaitu dengan jumlah Rp485.989.714.000,- (atas dasar harga berlaku), dan sebesar Rp413.726.984.000,- (atas dasar harga konstan tahun 1983). Disusul kemudian oleh sektor pertanian dengan jumlah Rp202.728.855.000,- (atas dasar harga berlaku), kemudian sebesar Rp191.323.423.000,- (atas dasar harga konstan tahun 1983) atau sebesar 51,32% untuk sektor pertambangan dan 21,41% untuk sektor pertanian. Sedangkan sektor Pemerintahan menempati urutan ketiga (8,29%), kemudian sektor perdagangan (7,35%), hotel dan restoran (7,04%), transport dan komunikasi (3,90%). Setelah itu berturut-turut sektor bangunan (3,52%), jasa-jasa (2,45%), industri (0,75%), listrik dan air minum (0,44%), sewa rumah dan bank (0,39%).

DPRB Irian Jaya tahun 1972 berjumlah Rp797.577.724.000,- meningkat pada tahun 1983 (akhir Pelita III) menjadi Rp883.578.530.000,- dan pada awal Pelita IV meningkat lagi menjadi sejumlah Rp946.923.279.000,-. Lihat Tabel III-1, III-2 dan III-3.

1. Sektor Pertanian dan Pengairan

Perkembangan pembangunan di Irian Jaya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu ladang berpindah, bertani menetap, dan bertani modern. Sistim ladang berpindah masih mendominasi cara pertanian di sini dan mengakibatkan terjadinya pengundulan yang diikuti oleh erosi terutama di daerah pegunungan Jayawijaya dimana lahan pertanian terletak di lereng-lereng bukit dan dengan kemiringan 10%, 70% dan curah hujan yang cukup tinggi yaitu antara 3.000 - 4.000 mm. **Sistim bertani menetap** kebanyakan dilakukan penduduk pada tanah-tanah yang relatif subur, seperti di lembah-lembah Baliem dan lokasi resettlement, lembah Enarotali dan lembah-lembah lain di pegunungan Jayawijaya. **Sistim bertani yang sudah maju** terdapat di lokasi transmigrasi, yang umumnya telah diterapkan penggunaan pupuk, bibit unggul, pestisida, serta tehnik pengolahan tanah yang baik serta tehnik pengolahan tanah yang baik serta pengairan yang memadai.

Usaha pengembangan pertanian pangan misalnya di masa Pemerintah Belanda belum mendapat perhatian karena mereka lebih memusatkan kegiatan pada komoditi ekspor seperti kelapa, coklat, kopi dan pala. Kebijaksanaan ini masih tetap dilakukan sampai akhir masa UNTEA yaitu tahun 1963. Barulah pada tahun 1964 pengembangan pertanian dipusatkan pada pertanian pangan yang pada Pelita I hingga sekarang pengembangannya dilaksanakan secara berimbang. Dalam periode Pelita I usaha-usaha pengembangan pertanian pangan ditangani dengan dana FUNDWI yang kegiatannya dipusatkan pada : Peningkatan produksi padi di Kumbe dan Merauke; Peningkatan produksi sayuran, buah-buahan dan palawija di Merauke, Nabire, Jayapura, Manokwari, Biak, Wamena dan Ransiki.

Kemampuan petani untuk mengolah lahan usaha taninya berkisar antara 0,6 Ha bagi petani transmigrasi dan 0,3 Ha bagi petani lokal. Usaha untuk meningkatkan kemampuan pengolahan tanah juga ditempuh dengan memperkenalkan ternak sapi untuk membajak sawah serta penggunaan traktor di beberapa tempat di Irian Jaya.

Luas daratan Irian Jaya sekitar 51.066.000 Ha, dan tingkat kemampuan tanah untuk lahan pertanian termasuk dalam kelas IV s/d VIII. Untuk tanah kelas IV sebanyak 1.144 Ha terdapat di Merauke, Manokwari. Tanah kelas V sebanyak 17.156 Ha terdapat di Kepala Burung, Fak-Fak, Jayapura, dan Yapen Waropen. Tanah kelas VI sebanyak 6.688 Ha terdapat di Kepala Burung, Fak-Fak, Jayapura, Yapen Waropen, Nabine dan Jayawijaya. Tanah kelas VII hanya terdapat di Nabire dan Jayawijaya, sedangkan tanah kelas VIII sebanyak 16.612 Ha terdapat di Kepala Burung, Fak-Fak, Jayapura dan Jayawijaya.

which reached the mountainous areas in central Irian Jaya, can not reach throughout the regions of Irian Jaya.

Development in Irian Jaya Province during Pelita III viewed from the Regional GDP based on the current price and the constant price in 1983 showed an increase which continued until the beginning of Pelita IV (1984).

According to data on economic development in 1983, in the province of Irian Jaya, the sector of mining and quarry, which is considered the leading sector, contributes to the development Rp485,989,714,000,- (based on current price) and Rp413,726,984,000 (based on constant price).

Following was the agricultural sector totaling Rp202,728,855,000,-- (based on the current price) and Rp191,323,423,000,-- (based on the constant price) in 1983, meaning 51.32% came from the sector of mining and 21.41% from the sector of agriculture. The third was government sector scoring 8.29%, followed by the trade sector with 7.35%, hotel and restaurant with 7.04%, transport and communication with 3.90%. The sector of construction comes next with 3.52%, services 2.45%, industries 0.75%, Electricity and fresh water 0.44%, and house rent and bank 0.39%.

The grand total of Irian Jaya GDP in 1972 was Rp797,577,724,000,-- rising to Rp883,578,530,000,-- in 1973 and in the beginning of Pelita IV increased again to Rp946,923,279,000,-- (See Tables III-1, III-2 and III-3).

Tabel / *Table III — 1*

INDEKS PERKEMBANGAN PROPINSI IRIAN JAYA ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU TAHUN 1982 - 1984
DEVELOPMENT INDEX BASED ON THE CURRENT PRICE IN IRIAN JAYA, 1982 — 1984

No.	Lapangan Usaha / *Field of undertaking*	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
1.	Pertanian/*Agriculture*	87,04	100,00	116,82
	1.1. Tanaman Bahan Makanan/ *Food Crop Plant*	82,74	100,00	118,50
	1.2. Tanaman Perk. Rakyat/ *Smallholder Plant*	81,29	100,00	158,79
	1.3. Peternakan/ *Animal Husbandry*	78,25	100,00	118,50
	1.4. Perikanan/*Fishery*	100,27	100,00	117,29
	1.5. Kehutanan/*Forestry*	115,09	100,00	63,46
2.	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	93,83	100,00	100,98
	2.1. Pertambangan/*Mining*	93,87	100,00	100,87
	2.2. Penggalian/*Quarrying*	81,96	100,00	130,28
3.	Industri/*Industry*	82,82	100,00	120,99
4.	Listrik & Air Minum/ *Electric & Drinking Water*	77,57	100,00	124,26
	4.1. Listrik/*Electric*	77,33	100,00	124,75
	4.2. Air Minum/*Drinking Water*	83,83	100,00	111,73
5.	Bangunan/*Construction*	79,77	100,00	115,01
6.	Perdagangan Hotel & Restoran/ *Trade, Hotel & Restaurant*	92,80	100,00	111,98
	6.1. Perdagangan/*Trade*	92,98	100,00	111,74
	6.2. Hotel/*Hotel*	77,61	100,00	95,55
	6.3. Restoran/*Restaurant*	91,21	100,00	123,76
7.	Transport & Komunikasi/ *Transport & Communication*	78,90	100,00	111,77
	7.1. Angkutan Darat/ *Land Transport*	73,53	100,00	113,69
	7.2. Angkutan Udara/ *Air Transport*	84,24	100,00	111,51
	7.3. Angkutan Laut/ *Sea Transport*	92,78	100,00	121,77
	7.4. Komunikasi/*Communication*	74,05	100,00	94,60
8.	Bank/*Banking*	101,00	100,00	84,53
9.	Sewa Rumah/*House Rent*	85,86	100,00	110,47
10.	Pemerintahan/*Government*	83,24	100,00	112,60
11.	Jasa-jasa/*Services*	87,70	100,00	114,00
	Produk Domestik Regional Bruto / *The Regional Gross Domestic Product*	90,27	100,00	107,17

Sumber : Irian Jaya dalam Angka Tahun 1985
Source : Irian Jaya in Figures 1985.

1. Agricultural and Irrigation Sector

Development in Irian Jaya can be devided into three groups namely nomadic agriculture, permanent agriculture, and modern agriculture. The nomadic agriculture practice is predominantly in this province and this, among others, causes erosion of the forest area at the Jayawijaya mountain range where the farmers land are on slopes slanting between 10-70° with a rainfall between

Tabel / *Table III — 2*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1983 PROPINSI IRIAN JAYA DIPERINCI MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1982 - 1984

THE REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT BASED ON THE 1983 CONSTANT PRICE, BY FIELD OF UNDERTAKING IN IRIAN JAYA, 1982 - 1984

(dalam ribuan rupiah) / *(in thousand rupiah)*

No.	Lapangan Usaha *Field of undertaking*	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
1.	Pertanian/*Agriculture*	167.247.004	173.545.456	191.323.423
	1.1. Tanaman Bahan Makanan/ *Food Crop Plant*	104.050.333	116.513.034	126.706.254
	1.2. Tanaman Perk. Rakyat/ *Smallholder Plant*	6.568.147	4.916.471	5.545.361
	1.3. Peternakan/ *Animal Husbandry*	11.518.953	12.855.268	13.633.369
	1.4. Perikanan/*Fishery*	33.884.367	31.039.823	38.445.267
	1.5. Kehutanan/*Forestry*	11.225.204	8.220.860	6.993.172
2.	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quarrying*	538.098.506	481.280.341	413.726.984
	2.1. Pertambangan/*Mining*	536.472.451	479.528.207	411.647.270
	2.2. Penggalian/*Quarrying*	1.626.055	1.752.134	2.079.714
3.	Industri/*Industry*	5.122.612	5.857.602	6.119.251
4.	Listrik & Air Minum/ *Electric and Drinking Water*	3.324.363	3.376.853	3.670.762
	4.1. Listrik/*Electric*	3.207.517	3.251.056	3.535.866
	4.2. Air Minum/*Drinking Water*	116.846	125.797	134.896
5.	Bangunan/*Construction*	25.365.085	29.002.245	31.457.421
6.	Perdagangan Hotel & Restoran/ *Trade, Hotel and Restaurant*	66.127.741	62.124.673	68.017.910
	6.1. Perdagangan/*Trade*	63.827.286	59.633.740	65.299.168
	6.2. Hotel/*Hotel*	535.807	530.737	432.369
	6.3. Restoran/*Restaurant*	1.764.648	1.960.196	2.286.378
7.	Transport & Komunikasi/ *Transport and Communication*	32.768.038	33.013.080	34.008.529
	7.1. Angkutan Darat/ *Land Transport*	16.362.385	16.217.281	15.784.588
	7.2. Angkutan Udara/ *Air Transport*	5.397.865	6.166.432	6.097.299
	7.3. Angkutan Laut/ *Sea Transport*	5.795.441	5.633.784	6.290.470
	7.4. Komunikasi/*Communication*	5.212.347	4.995.583	5.856.172
8.	Bank/*Banking*	2.313.991	1.923.369	1.544.125
9.	Sewa Rumah/*House Rent*	3.281.321	3.368.927	3.462.745
10.	Pemerintahan/*Government*	55.933.235	69.730.429	72.521.730
11	Jasa-jasa/*Services*	18.950.140	20.355.555	21.638.383
	Produk Domestik Regional Bruto *The Regional Gross Domestic Product*	918.532.036	883.578.530	847.491.263

Sumber : Irian Jaya dalam Angka Tahun 1985

Source : Irian Jaya in Figures 1985.

Tabel / *Table III — 3*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU PROPINSI IRIAN JAYA DIPERINCI MENURUT LAPANGAN USAHA 1982 - 1984

THE REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT BASED ON THE CURREN PRICE, BY FIELD OF UNDERTAKING IN IRIAN JAYA, 1982 - 1984

(dalam ribuan rupiah) / *(in thousand rupiah)*

No.	Lapangan Usaha *Description*	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
1.	Pertanian/*Agriculture*	151.046.117	173.545.456	202.728.85
	1.1. Tanaman Bahan Makanan/ *Food Crop Plant*	96.405.212	116.513.034	138.063.80
	1.2. Tanaman Perk. Rakyat/ *Smallholder Plant*	3.996.825	4.916.471	7.806.731
	1.3. Peternakan/ *Animal Husbandry*	10.059.294	12.855.268	15.234.01
	1.4. Perikanan/*Fishery*	31.123.522	31.039.823	36.407.40
	1.5. Kehutanan/*Forestry*	9.461.234	8.220.860	5.216.89
2.	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining & Quarrying*	451.586.955	481.280.341	485.989.71
	2.1. Pertambangan/*Mining*	450.150.823	479.528.207	483.707.04
	2.2. Penggalian/*Quarrying*	1.436.132	1.752.234	2.282.67
3.	Industri/*Industry*	4.851.030	5.857.602	7.087.29.
4.	Listrik & Air Minum/ *Electric & Drinking Water*	2.619.453	3.376.853	4.196.11
	4.1. Listrik/*Electric*	2.513.999	3.251.056	4.055.56
	4.2. Air Minum/*Drinking Water*	105.454	125.797	140.55
5.	Bangunan/*Construction*	23.049.254	29.002.245	33.354.30
6.	Perdagangan Hotel & Restoran/ *Trade, Hotel & Restaurant*	57.649.610	62.124.673	69.568.40
	6.1. Perdagangan/*Trade*	55.449.737	59.633.740	66.639.48
	6.2. Hotel/*Hotel*	411.888	530.737	506.07
	6.3. Restoran/*Restaurant*	1.787.985	1.960.196	2.425.84
7.	Transport & Komunikasi/ *Transport & Communication*	26.045.697	33.013.080	36.899.09
	7.1. Pengangkutan Darat/ *Land Transport*	11.924.845	16.217.281	18.437.41
	7.2. Pengangkutan Udara/ *Air Transport*	5.194.535	6.166.432	6.875.9
	7.3. Pengangkutan Laut/ *Sea Transport*	5.226.906	5.633.784	6.860.1
	7.4. Komunikasi/*Communication*	3.699.411	4.995.583	4.725.5
8.	Bank/*Banking*	1.942.596	1.923.369	1.625.8
9.	Sewa Rumah/*House Rent*	2.892.481	3.368.927	3.721.5
10	Pemerintahan/*Government*	58.042.228	69.730.429	78.519.5
11.	Jasa-jasa/*Services*	17.852.303	20.355.555	23.205.5
	Produk Domestik Regional Bruto ***The Regional Gross Domestic Product***	797.577.724	883.578.530	946.923.2

a. Tanaman Pangan

Luas lahan pertanian yang telah digarap hingga Pelita III antara 90.000 - 100.000 Ha, 95% berupa lahan kering dan 5% merupakan sawah tadah hujan. Produksi tanaman pangan dalam Pelita II hingga Pelita III secara keseluruhan terus meningkat, disertai perluasan areal yang bertambah karena adanya program transmigrasi.

Jenis tanaman pangan di Irian Jaya terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, keladi/ubi-ubian, serta sayur-sayuran dan buah-buahan.

Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya, produksi hasil pertanian tanaman pangan terpenting tahun 1979 hingga 1985 mengalami peningkatan. Lihat Tabel III-4 dan III-5.

Produksi beras selama Pelita II di Irian Jaya belum diusahakan secara intensif. Program Bimas atau Inmas belum ada di daerah ini. Rata-rata produksi beras per hektar sawah tadah hujan 12,1 kwintal dan padi ladang 7,8 kwintal.

Sejak tahun 1981 diadakan permulaan pelaksanaan Program Bimas. Rata-rata luas panen adalah 524 Ha. Pelaksanaan Bimas di Irian Jaya masih terbatas pada lima Kabupaten daerah transmigrasi (Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari dan Paniai). Produksi rata-rata beras per tahun yang dihasilkan dari areal intensifikasi sebanyak 2.096 ton atau sekitar 51,8%. Lihat Tabel III-6.

Adapun prosentase produksi intensifikasi sudah meningkat dalam dua tahun Pelita III 81,7%. Tahun 1981 produksi intensifikasi untuk beras mencapai 4 ton, dan tahun 1982 naik menjadi 4,30 ton atau dengan kenaikan rata-rata 7,5%/tahun. Sedangkan untuk non inten-

3,000 - 4,000 mm. The permanent agricultural is practiced at the relativ fertile part of land such as the Baliem valley and resettlement location, Enarotali valley and other valleys in the Jayawijaya mountain range. The m advanced-agricultural system is practiced at the transmigration locations wh the farmers generally use fertilisers, prime seed, pesticide and the propper k tilling and irrigation.

During the Dutch colonial administration, the agricultural developm did not get much attention, because they direct activities more towards planting of export commodities such as coconut, cocoa, coffee and nutm

This situation continued up to the end of the UNTEA period in 1963 ? Si 1964, the agricultural development was focussed on food stuff produce wh since Pelita I its development was run in balance. During Pelita I, eff concerning the improvement of food crops was funded by FUNDWI cover that of rice production in Kumbe and Merauke, and vegetables, fruits second crops in Merauke, Nabire, Manokwari, Biak, Wamena and Rans

In general the farmer is able to cultivate 0.6 ha of land (the transmigr farmer) and 0.3 ha of land (the local farmers). Efforts to increase the abilit cultivate land is carried out by introducing oxen for ploughing rice fields tractor in various regions in Irian Jaya.

The total extent of land area of Irian Jaya is 51,066,000 ha whereas agricultural land is catagorised in 4th to 8th class. The land capacity belong to class IV total 1,144 ha located in Merauke and Manokwari. That of c V is 17,156 ha in Kepala Burung, Fak-Fak, Jayapura and Yapen Warop That of class VI is 6,688 ha, in Kepala Burung, Jayapura, Yapen Warop Nabire and Jayawijaya. The type of soil belonging to class VII is only Nabire and Jayawijaya whereas that of class VIII total 16,612 ha in Kep Burung, Fak-Fak, Jayapura and Jayawijaya.

sifikasi tahun 1979 sebanyak 1,75 ton, tahun 1980 naik menjadi 2,02 ton, tahun 1981 menjadi 1,73%, dan tahun 1982 turun menjadi 1,40 ton atau rata-rata kenaikan per tahun sebanyak 5,9%.

Sedangkan luas panen palawija selama Pelita II secara keseluruhan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata prosentase kenaikan yang didapat pada kedele cukup baik yaitu sebesar 37,7%, dan kenaikan rata-rata yang tidak nyata pada ubi jalar sebesar 2,3%. Peningkatan yang didapat ini belum merupakan intensifikasi penuh dari luas areal intensifikasi palawija yang baru rata-rata 0,07% dari luar areal di Irian Jaya. Lihat Tabel III-7.

Produksi hortikultura yang dicapai sampai dengan empat tahun Pelita III juga meningkat. Perkembangan tersebut disebabkan adanya perluasan areal taman sayuran di daerah transmigrasi dan tanaman buah-buahan yang sejak 10 - 15 tahun lampau mulai berproduksi. Hampir semua Kabupaten dapat mengembangkan buah-buahan, dan prospeknya di masa datang cukup baik hanya perlu ditingkatkan sumber bibit yang bermutu.

Sebagai sumber karbohidrat penduduk Irian Jaya yang mengkonsentrasi umbi-umbian di daerah pedalaman dan daerah tanah kering, sagu di daerah pantai dan padi di daerah transmigrasi dan kota-kota. Kebutuhan akan jenis bahan makanan tersebut ialah umbi-umbian sebanyak 40%, sagu 25% dan beras 35%. Namun secara bertahap pola konsumsi di Irian Jaya menunjukkan adanya perubahan dari non beras beralih ke beras, sehingga proporsi beras sebagai makanan pokok semakin meningkat. Hal ini terlihat dari tingkat konsumsi beras/kapita/tahun yang mengalami kenaikan dari 42,39 Kg dan pada tahun 1980 menjadi 46,82 kg pada tahun 1983. Konsumsi total beras tahun 1983 menjadi 59.473 ton, yang dipenuhi dari wilayah Irian Jaya sebanyak 15% dan sisanya didatangkan dari daerah luar Irian Jaya dan diimpor.

Peningkatan produksi tanaman pangan juga karena didukung oleh pengadaan Saprotan (benih, pestisida, pupuk) yang sejak tahun 1977/

a. Food Crops

During Pelita III the total area of cultivated agricultural land is between 90,000 - 100,000 ha, of which 90% was dry field and 5% rain fed rice field. The Production of food crops during Pelita II and Pelita III indicated an increase with an extension of agricultural land due to the realisation of the transmigration pgoramme.

Kinds of food crop in Irian Jaya are the paddy, corn, cassava, sweet potato, Soy bean, peanuts, small peas, vegetables and fruits.

According to a report of the Food Crop Division of Regional Secretariat of Irian Jaya Province, the important food crops in the region 1979 - 1985 had increased. See Tables III-4 and III-5).

Rice production during Pelita II in Irian Jaya had not experienced intensive endeavours. Mass Guidance and Mass intensification programmes were not yet applied in this region. The average production of rainfed rice fields was 1,210 kg per ha and that of unirrigated rice field was 780 kg per ha.

The Mass Guidance Programme was introduced for the first time in 1981. The average of harvest area was 524 ha. The implementation of The Mass Guidance Programme (BIMAS) was limited to 5 districts which are also places of transmigration such as Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari and Paniai. The average rice production of the intensification areas totalled 2,096 tons or around 51.8% of the total production. See Table III-6.

During the first two years of Pelita III, the percentage of intensification production increased by 81.7%. In 1981, rice intensification production reached 4 tons per ha and in 1982 it went up to 4.30 tons per ha or an increase of 7.5% per annum. Whereas the harvest of non intensification programme fields in 1979 totalled 1.75 tons per ha. In 1980 it rose to 2.02 tons, and in 1981 it became 1.73%. In 1982 it declined to 1.40 tons per ha which makes an average increase of 5.9% per annum.

Tabel / ***Table III — 4***

TABEL, LUAS AREAL & PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI IRIAN JAYA 1979 S/D 1983
AREA AND PRODUCE TABLE OF FOOD CROP IN IRIAN JAYA, 1979 - 1983

No Komoditi ***Commodity***	1979		1980		1981		1982		1983	
	LP (Ton) ***HA***	Pr (Ha) ***Pr***	LP ***HA***	Pr ***Pr***	LP ***HA***	Pr ***Pr***	LP ***HA***	Pr ***Pr***	LP ***HA***	Pr ***Pr***
1. Padi sawah/*Unirrigated Paddy*	468	866	1.333	3.257	1.657	4.421	1.567	5.079	2.724,34	5.214,90
2. Padi ladang/*Irrigated Paddy*	406	505	758	1.231	1.108	1.773	1.227	2.221	4.301,30	7.770,91
3. Jagung/*C o r n*	560	2.079	594	2.023	2.893	3.329	3.389	3.845	3.710,30	3.075,17
4. Ubi kayu/*Cassava*	3.360	18.102	5.217	26.118	11.076	54.119	8.537	31.780	9.531,20	53.479,47
5. Ubi jalar/*Sweet potatoes*	5.802	22.529	759	3.451	49.672	350.245	42.108	207.956	58.336,68	387.269,52
6. Kedelai/*Soy beans*	1.595	1.721	1.829	1.763	2.371	1.738	1.721	13.348	3.153,50	2.614,40
7. Kacang tanah/*Peanut*	1.940	1.628	2.392	1.911	1.825	1.487	1.663	1.346	2.599,47	1.954,29
8. Kacang hijau/*Green pea*	368	378	131	291	361	230	367	168	738,79	504,35
9. Keladi/ubi-ubian/*Cassava*	7.456	34.166	4.313	16.725	4.676	42.766	7.548	37.400	5.033	34.856,20
10. Sayur-sayuran/*Vegetables*	3.756	107.556	4.168	13.010	4.929	13.032	6.630	15.649	6.366,50	20.107,50
11. Buah-buahan/*Fruits*	7.350,15	28.067,3	8.120,75	29.919,81	6.876,15	22.917,36	12.402,86	27.842,38	12.274	27.048,80

Sumber : *Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya*
Source : The Food Crops Division in Irian Jaya.
LP = Luas Panen ***HA = Harvesting Area***
Pr = Produksi / ***Pr = Production.***

Tabel / ***Table III — 5***

LUAS PANEN, RATA—RATA PRODUKSI DAN PRODUKSI MENURUT JENIS TANAMAN DI IRIAN JAYA TAHUN 1983 - 1985
HARVESTING AREA, PRODUCTION AVERAGE AND PRODUCTION BY KINDS OF PLANT IN IRIAN JAYA, 1983 - 1985

No Jenis Tanaman ***Kinds of Plant***	1983			1984			1985		
	Luas Panen ha ***HA***	Rata-rata hasil ton/ha ***PA***	Produksi ton ***PT***	Luas panen ha ***HA***	Rata-rata hasil ton/ha ***PA***	Produksi ton ***PT***	Luas panen ha ***HA***	Rata-rata hasil ton/ha ***PA***	Produksi ton ***PT***
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Padi-padian/*Paddy*	7.116	1,82	12.986	8.341	3,07	25.577	7.416	3,00	22.249
2. Jagung/*C o r n*	3.711	0,58	2.169	3.360	0,82	2.742	2.802	1,40	3.923
3. Ubi-ubian/*Cassava*	67.839	6,50	440.749	52.621	7,01	368.863	51.469	6,57	338.144*
4. Kacang tanah/*Peanut*	2.600	0,75	1.954	1.825	0,64	1.169	6.264	0,30	1.885
5. Kacang kedelai/*Soy bean*	3.154	0,83	2.614	2.808	0,87	2.435	4.575	1,08	4.941
6. Kacang hijau/*Green pea*	740	0,68	504	932	0,54	504	777	0,74	575
7. Sayur-sayuran/*Vegetables*	4.361	4,16	18.124	5.859	3,04	17.792	3.283	3,36	11.043
8. Buah-buahan/*Fruits*	12.275	2,20	27.049	22.193	1,42	31.307	22.193	1,42	31.307

Sumber Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Irian Jaya
Source : Division of Food Crop in Irian Jaya Province.
Keterangan * tidak termasuk keladi / ***not included keladi.***
HA = Harvesting Area
PA = Production Average in tonnes Per ha
PT = Production in tonnes

Tabel / *Table III — 6*

LUAS PRODUKSI BERAS TAHUN 1979 S/D 1982
RICE PRODUCE AREA IN 1979 - 1982

No Uraian *Legend*	1979		1980		1981		1982		1983	
	Luas (Ha) *Areas*	Prod (Ton) *Prod.*	Luas (Ha) *Areas*	Prod (Ton) *Prod.*	Luas (Ha) *Areas*	Prod (Ton) *Prod.*	Luas (Ha) *Areas*	Prod (Ton) *Prod.*	Luas (Ha) *Areas*	Prod (Ton) *Prod.*
1. Intensifikasi/*Intensification*					372	1488	676	2704		
2. Non Intensifikasi/ *Non Intensification*	468	818	1332	2694	1284	2218	1191	1671		
3. Total	468	818	1332	2694	1656	3706	1867	4375		
4. Prosentase Intensifikasi thd Total/ *Intensification Percentage to Total*	0	0	0	0	22,5	40,2	36,2	61,8		

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Division of Food Crop in Irian Jaya Province.

Tabel / *Table III — 7*

LUAS PANEN DAN PRODUKSI HORTIKULTURA SELAMA 1979 S/D 1982 DI IRIAN JAYA
HARVESTING AREA AND HORTICULTURA PRODUCTION IN IRIAN JAYA, 1979 - 1982

(Ha)

No	Jenis Tanaman *Kinds of Plant*	1979	1980	1981	1982	Rata-rata Kenaikan/ Tahun (%) *Increase Average Annually (percentage)*
1.	Sayuran/*Vegetables*					
	a. Luas panen (Ha)/ *Hasvesting Area*	3.518	4.166	4.945	7.145	27,2
	b. Produksi (Ton)/*Production*	10.277	12.844	13.060	18.288	22,23
	c. Produktivitas (Ton/Ha)/ *Productivity*	2,9	3,1	2,6	2,5	1,8
2.	Buah-buahan/*Fruits*					
	a. Luas panen (Ha)/ *Harvesting Area*	7.123	8.190	6.813	12.402	26,73
	b. Produksi (Ton)/*Production*	27.414	12.320	22.917	27.880	1,51
	c. Produktivitas (Ton/Ha)/ *Productivity*	3,8	1,5	3,36	2,2	9,6

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya
Source : Division of Food Crop of Irian Jaya Province.

1978 telah mulai dilaksanakan. Di Irian Jaya penggunaan benih varietas padi (VUB), VUTW, VUL) terus meningkat. Begitu pula penggunaan pestisida dan pupuk. Hal ini karena adanya paket transmigrasi dan pelaksanaan Bimas. Namun dalam hal penanganan dan pembinaan Pasca Panen di Irian Jaya nampak masih lemah. Hal ini terlihat dalam keadaan pengadaan peralatan maupun pergudangan terutama gudang/ lumbung-lumbung yang dimiliki para petani yang kebanyakan belum memenuhi syarat. Saat ini bi[illegible] dibangun gudang-gudang KUD bersama unit penggilingan padi sebanyak 17 unit tersebar di Kabupaten Jayapura sebanyak 5 unit, Merauke 7 unit, Manokwari 2 unit dan di Kabupaten Paniai 3 unit.

Kesulitan yang dialami petani dalam pengamaman hasil atau perlakuan pasca panen sangat berpengaruh terhadap mutu hasil yang dijual kepada Dolog. Berkurangnya nilai hasil sekaligus mengurangi tingkat harga disebabkan mutu yang kurang baik. Misalnya sebagian pengeringan kedele langsung dijemur di lapangan, kemudian penyimpanan hasil di gudang kadang dilakukan tanpa alas yang langsung di lantai.

Sedangkan keadaan tenaga penyuluh di Irian Java baru terpenuhi rata-rata 26% (PPS = 30%, PPM = 27%, PPL = 30% dan PPS Propinsi 20%). Jumlah ini belum termasuk daerah transmigrasi yang diperhitungkan setiap 4.000 KK terdapat satu BPP dan empat PPL sehingga dalam Repelita IV dibutuhkan sekitar 400 PPL dan 100 PPM di daerah transmigrasi. Dalam hal kegiatan penyuluhan dengan latihan dan kunjungan (LAKU) telah dilaksanakan dengan 617 kelompok tani yang dibina oleh 115 PPL, 20 PPM dan 6 PPS. Kegiatan penyuluhan melalui BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang kini telah dibangun sebanyak 10 BPP tersebar di masing-masing Kabupaten 1 buah kecuali di Kabupaten Manokwari sebanyak 2 buah.

Selain BPP, dalam operasional penyuluhan maka perlu didukung oleh Catur Sarana dimana kelembagaan ini bukan saja dari Dinas Per-

The harvest area of second crops have increased by the year during Pelita II. The average increase of soy bean harvest was a favourable 37.7%, and that of sweet potatoes 2.3%. This improvement did not include areas with intensification efforts which covered only 0.07% of the total area in Irian Jaya. See Table III-7.

Horticultural produce during the 4 years of Pelita III also showed an increase. This was due to the extension of cultivation area of vegetables in transmigration area, and fruits that was planted 10 - 15 years ago which had begun producing. Almost all districts have developed fruit cultivating which show a good prospect for the future more so when applying good quality seeds.

As a source of carbohydrate the local people consentrate the cultivation of sweet potatos in the hinter land and the dry land, sago at the sea side areas and paddy at the transmigration and urban areas. The rate of consumption of these staple food is 40% sweet potatos, 25% sago and 35% rice. But gradually the consumption pattern in Irian Jaya changed from non-rice to rice, which changed the posititon of rice in the pattern. This is indicated by the level of consumption of rice per capita which rose from 42.39 kg in 1980 to 46.82 kg in 1983. The total consumption of rice in 1983 was 59,475 tons of which 15% was that of local produce and the rest imported from other provinces.

The development of food crops production was supported by the provision of the Agricultural production means (Saprotan) such as seeds, pesticide and fertiliser since 1977/1978. High yielding rice varities of the VUB, VUTW and VUL, fertilisers and pesticide were gradually used with the available distribution of transmigration packages in realising BIMAS programme. But the handling and directives of post harvest efforts are still found ineffective. This is reflected from the lack of warehouses, mainly rice-barns. Those belonging to the farmers are mostly not qualified. At the moment there are 17 huller units in Irian Jaya of which 5 units are in Jayapura, 7 units in Merauke, two units in Manokwari and 3 units in Paniai Districts, together with KUD (Regional Cooperatives Units).

The difficulties in handling the post harvest matters affected the quality of harvest sold to Logistic Depot (Dolog). For instance when drying soy-beans in the sun, the beans are put out on an open field and later on when in the warehouse, the beans are just scuttered directly on the flon without putting layers to keep the moist from the ground, so that the beans are mostly damp.

As to the technical information officers in Irian Jaya only an average of 26% could be met, (PPS = 50%, PPM = 27%, PPL = 30% and Provincial PPS = 20%). These figures does not include transmigration areas of 4,000 of family with one BPP and four PPL each so that in Repelita IV the transmigration areas need 400 PPL and 100 PPM. Vocational training and information activities had been carried out towards 617 farmers groups by 115 PPL, 20 PPM and 6 PPS. Consultation activities on technical information was provided by the Agricultural Technical Information centre. At that time, 10 centres had been established, namely one in each district, except for Manokwari District which received two centres.

In guidance efforts besides the ricecrop agricultural division there is also the four supporting facilities consisting of non-Foodstuff Agricultural Agents but institutions such as the Village Unit of BRI, Kios Saprodi, Village People Bank, Village Unit Co-operatives which should support each other. See Tables III-8, III-9 and III-10.

b. Fishery

Fishery potential in Irian Jaya is of economic value because its fishery area convers an extent of 2,000 miles of coastal line and with the decision of Exclusive Economic Zone ranging up to 200 miles of the sea shores the total sea territory of this province is 400,000 sq. miles. The inland fishery waters such as lakes, rivers and swamps total around 515,000 ha. The fishery potential having economic value can be devided into 4 groups namely (1) the Pelogis and

tanian Tanaman Pangan tapi misalnya BRI Unit Desa, Kios Saprodi dan KUD (Koperasi Unit Desa) haruslah secara bersama saling menunjang. Lihat Tabel III-8, III-9 dan III-10.

Tabel / *Table III — 8*

PENYEBARAN VARIETAS PADI DI IRIAN JAYA MT 1977/1978 - 1981/82
THE USE OF RICE VARIETIES IN IRIAN JAYA, 1977/1978 - 1981/1982

No.	Tahun *Year*	V.U. Lama *Old high yield Varieties*	V. Lokal *Local Varieties*	V.U.B. *New high Varieties*	V.U.T.W. *Wereng resisting high Varieties*	Jumlah per tahun *Total per-annum*
1.	1977-1978	120.05	843.39	23.214.62	1.86	1.202.92
2.	1978-1979	-	1.243.20	129.330.47	36.80	1.706.37
3.	1980-1981	90.90	976.50	62.61 503.30	519.60	2.090.11
4.	1981-1982	59.00	797.10	60.17 330	1.494.50	2.743.77

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Agricultural Division (Service) of Food Crops Affairs of Regional Office of Irian Jaya.

Tabel / *Table III — 9*

PENGGUNAAN PESTISIDA DI IRIAN JAYA TAHUN 1979 S/D 1983
PESTICIDE USE IN IRIAN JAYA, 1979 - 1983

No.	Uraian *Description*	1979	1980	1981	1982	1983
1.	Insektisida (Kg)/ *Insecticide (Kg)*	1.059	1.160	6.492	8.711,1	
2.	Rodentisida (Kg)/ *Rodenticide (Kg)*	508,5	903	1.607	3.018,5	
3.	Fungisida (Kg)/ *Fungicide (Kg)*	197	-	1.287	1.484	
4.	Lain-lain (Liter)/ *Others (Litre)*	1.308,6	-	771	2.079,6	

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Agricultural Division (Service) of Food Crops Affairs of Regional Office of Irian Jaya.

b. Perikanan

Potensi Propinsi Irian Jaya dalam perikanan dengan panjang pantai yang mengelilingi daratan Irian Jaya sekitar 2.000 mil, dan dengan ditetapkannya Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari pantai, luas laut Irian Jaya mencapai sekitar 400.000 mil persegi. Sedangkan luar perairan umum berupa danau, sungai dan rawa ± 515.000 Ha. Potensi ikan yang mempunyai nilai ekonomis, dan dibagi dalam 4 kelompok yaitu : (1) Jenis ikan sebanyak 63 jenis ikan tergolong komersial terdiri dari jenis pelogis dan jenis demersal; (2) Jenis Udang (Penaid); (3) Jenis Kerang (Mollusca) dan (4) Jenis hasil laut lainnya.

Kegiatan dibidang usaha perikanan sampai kini sudah banyak memberi sumbangan bagi peningkatan konsumsi protein masyarakat serta peningkatan penerimaan devisa melalui ekspor hasil-hasil perikanan. Usaha di bidang ini dapat dibagi dalam : (1) Perikanan rakyat, kegiatannya dalam usaha penangkapan perikanan pantai, penangkapan di perairan umum dan budidaya air tawar dan payau; (2) Perikanan industri, yang kegiatannya dalam usaha penangkapan ikan lepas pantai, berupa penangkapan udang dan ikan tuna.

Usaha perikanan darat yang dilakukan adalah berupa pengenalan budidaya air tawar (kolam, keramba), pengenalan jenis-jenis ikan yang ekonomis, alat-alat penangkapan di perikanan umum berupa jaring insang dan lain-lain.

Usaha penangkapan ikan di laut dilaksanakan oleh perikanan rakyat adalah berupa penangkapan dengan tenda, jaring insang, pancing dasar, bagan jaring pantai, sero, pole dan line dan cara-cara penangkapan tradisional seperti dengan kelawai (tombak). Sebagai alat angkut digunakan perahu tidak bermotor atau bermotor dan kapal motor kecil. Lihat Tabel III-11.

Perikanan Usaha Budidaya

Usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan perikanan rakyat adalah budidaya perairan umum dan budidaya kolam. Budidaya perairan umum dilakukan seperti di danau Sentani dengan menggunakan kurengan dan jaring terapung (floating nets) dan budidaya air payau dengan tambak. Jenis ikan yang dibudidayakan di air tawar adalah ikan mas dan ikan nila, dan air payau dipelihara ikan bandeng dan udang. Disamping itu dilakukan juga penebaran jenis-jenis ikan yang komersial seperti mujair, ikan mas dan lain-lain ke perairan umum sungai-sungai, rawa dan danau.

Tabel / *Table III — 10*

PENGGUNAAN PUPUK SELAMA PELITA III DI IRIAN JAYA
THE USE OF FERTILIZER DURING PELITA III IN IRIAN JAYA

No.	Uraian *Kind of Fertiliser*	1979	1980	1981	1982	1983
1.	Urea (Ton)	229	500	985	1.375	
2.	TSP (Ton)	-	800	1.165	1.375	

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : The Second Crop Division of the Regional Office of Irian Jaya Province.

demersal fish species consisting of 63 kinds; (2) the Shrimps species (Penaid); (3) Mollusc species; and (4) other sea product.

Up to now, fishery sector has contributed a substantial consumption for the protein improvement of the people and increased fishery export to gain more foreign exchange. Efforts in this field can be devided into (1) smallholder fishery, which activities covers fishing along the seashores, public waters and fish cultivation in fresh water as wel as brackish water ponds; (2) Industrial Fishery, covering off shore fishing of shrimps and tuna fish.

The in-land fishery is carried out in the form of fresh water fish cultivation in ponds and bamboo cages, identification of the economical fish species, fishing tackle in the form of net and others.

Fish catching efforts which are carried out by smallholders with tiger trawl net, gill net, pole and line and other traditional means such as the spear. As for transport means, the people use traditional boats, motorised and unmotorised veessels. See Table III-11.

Tabel / *Table III — 11*

PRODUKTIVITAS ALAT PENANGKAPAN
PRODUCTIVITY OF FISHING TACKLE

No	Nama Alat *Equipment Name*	Hasil rata-rata per hari atau per trip *) (Kg) *Average product per trip in Kg*	Jumlah hari operasi per bulan atau per trip *Operation Day number per month trip*
1.	Pancing Malam/*Pole*	10	20
2.	Bubu/*Basket traps*	10	25
3.	Jala/*N e t*	15	25
4.	Sero/*Bamboo Catcher*	10	20
5.	Jaring insang/*Gill net*	20	20
6.	Pancing Tonda/*Drawn Pole*	100	20
7.	Jaring Torik/*N e t*	75	20
8.	Kapal Udang/*Shrimps Boat*	2.000 *)	25 *)
9.	Kapal Cakalang/*Tuna Boat*	500	20
10.	Bagan/*Bamboo Catcher*	20	20

Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Dati I Irian Jaya 1983
Source : The Fishery Division of Regional Office of Irian Jaya Province.

Fish Cultivating Activities

Fishery cultibation efforts of smallholders' is carried out in lakes, rivers and ponds. Activities of this kind in Lake Sentani, use cages and floating nets and that of the brackish fishery water cultivation, use ponds. Fresh water fish cultivation covers the common carps, and Tilapia whereas those in brackish ponds are the milk fish and shrimps. In addition, they also spread the seeds of other variaties of Mujair (tilapia), common carp and other kinds of fish in rivers, swamps and lakes.

The needs of fish seedlings in Irian Jaya was supplied by 23 units of seedlings centres that during the Pelita III supplied an average of 500,000 annually. The brackish water fish cultivation is still on introduction in Sorong, Paniai and Jayapura districts.

Activities of industrial fishery in Irian Jaya Province started in 1969 with the operation of shrimps trawl boats of WIFI Limited Company and the IMPD Limited Company. Since that period, the activities developed rapidly due to the operation of Foreign Investment Companies and Domestic Investment Companies in the business of shrimps, tuna and the cultivation of pearl oysters.

Industrial Fishery operates offshore while the Ocean fishery in Irian Jaya consists of five shrimps companies and 2 tuna fish companies operating 93 units of fhishing ships with a total investment amounting to $US 50.9 million. There are also fishing vessels which are based outside Irian Jaya such as Ambon, Manado and Jakarta. See Table III-12.

Fish landings consist of quays, Fishermen hall and fish auction places in Sorong, Manokwari and Biak. The quays had been utilised by fishermen but

Untuk keperluan benih ikan di Irian Jaya dilakukan/dilayani oleh 23 Balai Benih Ikan yang selama Pelita III setiap tahun rata-rata mencapai 500.000 ekor benih finsering. Budidaya tambak, baru dalam tahap pengenalan di daerah Sorong, Paniai dan Jayapura.

Kegiatan perikanan industri di Propinsi Irian Jaya dimulai pada tahun 1969 dengan beroperasinya kapal-kapal trawlen udang PT WIFI dan PT IMPD. Sejak itu kegiatan berkembang pesat dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN di bidang penangkapan udang, tuna dan pemeliharaan kerang mutiara (Budidaya air laut).

Perikanan industri melakukan kegiatan perikanan lepas pantai dan perikanan Samudera sampai kini di Irian Jaya berjumlah 5 perusahaan penangkapan udang dan 2 perusahaan tuna dengan jumlah kapal 93 buah dengan investasi sekitar US$ 50,9 juta. Di samping itu beroperasi juga kapal-kapal penangkapan udang yang pelabuhan basisnya di luar Irian Jaya seperti di Ambon, Manado, Jakarta. Lihat Tabel III-12.

Tempat pendaratan ikan yang terdiri dari dermaga, Balai Pertemuan Nelayan serta tempat pelelangan ikan terdapat di Sorong, Manokwari dan Biak. Yang sudah banyak dimanfaatkan oleh nelayan adalah dermaga, sedangkan Tempat Pelelangan Ikan belum berfungsi untuk pelelangan baru berfungsi sebagai pasar. Kondisi pasar ikan di kota-kota Kabupaten di pantai rata-rata masih sederhana dan diusahakan memenuhi persyaratan hygienis.

the auction places are still functioning as fish markets since the condition of fish markets in district towns were still very poor.

Efforts to improve the fishery quality especially for export purposes are met with the construction of a test laboratory for fish product in Sorong. This laboratory will examine the quality of shrimps, and tuna fish to be exported from Biak harbour. In 1984/1985 one such laboratory was established in Biak to examine the quality of fish to be exported from Biak.

In Irian Jaya there are cold storage and ice factories namely 5 cold storage in Sorong, and one in Biak; and 4 ice factories namely one in Sorong District, one in Biak and two in Jayapura.

Fishery production in Irian Jaya is consists of that of the smallholder and industrial fishery product. The existing potential of sea fishery total 400,000 tons annually with a production of 39,984 tons annually or a beneficial rate of 10%. These figures indicate that the total sea fishery product in this region is relatively small. In-land fishery had an existing potential totalling 13,300 tons annually with a production of 1,245 tons annually, meaning that the utilisation only reached about 9,36% annually.

Development of fishery production in Irian Jaya has been up and down due to external and internal factors. Fishery production during the first year of Pelita III (the sea and in-land fishery) amounted to 20,033.1 tons and at the end of Pelita III increased to 33,406.8 tons or an increase of around 60%. See Table III-13.

Tabel / ***Table III — 12***

PERUSAHAAN PERIKANAN YANG BEROPERASI DI IRIAN JAYA TAHUN 1983
FISHERY COMPANIES OPERATING IN IRIAN JAYA IN 1983

No	Nama Perusahaan *Name of Companies*	Pangkalan (basis) *Headquarters*	Bidang usaha *Business Area*	Alas *Equipment*	Jumlah kapal *Number of Boats*	Satuan *Investment*
1.	PT. West Irian Fishing Industries	Sorong	Penangkapan Udang/ *Shrimps*	Pukat udang/ *Shrimp Nets*	20	PMA
2.	PT. Irian Marine Product Development	Sorong	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang/ *Shrimps Nets*	10	PMA
3.	PT. Alfa Kurnia	Sorong	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang/ *Shrimps Nets*	10	PMA
4.	PT. Dwi Bina Utama	Sorong	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang/ *Shrimps Nets*	8	PMA
5.	PT. Mina Maya	Jayapura	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang/ *Shrimps Nets*	9	PMDN
6.	PT. Usaha Mina	Sorong	Penangkapan tuna/ *Tunas*	Pole & Line, Purseseine/	32	PMDN
7.	PT. Multi Transpeche Enterprise	Biak	Penangkapan tuna/ *Shrimps*	Pole & Line, Purseseine *Shrimp Nets*	4	PMA
8.	PT. Nusantara Fishery	Ambon	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang *Shrimp Nets*		PMA
9.	PT. Tofico	Ambon	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang *Shrimps Nets*		PMA
10.	PT. Mina Kartika	Jakarta	Penangkapan udang/ *Shrimps*	Pukat udang/ *Shrimp Nets*		PMDN

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984.
Source : Book of Irian Jaya Monograph in 1984.
Disamping itu masih ada perusahaan yang sudah mendapat izin beroperasi seperti
Besides, there are some companies has obtained operation permit such as :
a. PT Arta Samudra, yang bergerak dalam bidang usaha budidaya kerang mutiara di Sorong
PT Arta Samudra running in pearl oyster cultivation in Sorong.
b. PT Fortuna Marine Export, yang bergerak dalam bidang penangkapan cakalang dengan basis Jayapura
PT Fortuna Marine Export running in tunas catch with its basis in Jayapura.

Didalam usaha untuk pembinaan mutu hasil perikanan terutama untuk ekspor di Irian Jaya ada sebuah laboratorium pengujian hasil perikanan yaitu di Sorong. Laboratorium ini menguji mutu udang dan ikan cakalang, serta ikan tuna yang diekspor melalui pelabuhan Biak.

Yang pada tahun 1984/1985 dibangun untuk melayani pemeriksaan mutu hasil usaha perikanan yang diekspor dari Biak.

Sedangkan Cool Storage dan Pabrik Es di Irian Jaya terdapat 5 buah cool storage di Sorong, sebuah di Biak. Pabrik Es ada 4 buah yaitu di Kabupaten Sorong sebuah, Biak sebuah dan Jayapura 2 buah.

Produksi hasil perikanan Irian Jaya terdiri dari produksi perikanan rakyat dan produksi perikanan industri. Ditinjau dari semua jenis ikan maka produksi perikanan di Propinsi ini masih kecil, dimana untuk ikan laut mempunyai potensi lestari 400.000 ton/tahun dengan produksi sebanyak 39.984 ton dan dengan tingkat pemanfaatan ± 10%.

Ikan darat mempunyai potensi lestari sebesar 13.300 ton/tahun dengan produksi sebanyak 1.245 ton dan tingkat pemanfaatan sebesar ± 9,36%.

Perkembangan produksi perikanan di Irian Jaya mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern. Produksi ikan dalam tahun pertama Pelita III (perikanan darat maupun laut) sebanyak 20.033, 1 ton, meningkat menjadi 33.406,8 ton pada tahun terakhir Pelita III yang berarti naik sekitar 60%. Lihat Tabel III-13.

Sea fishery production in 1984 totalled 31,895 tons with a value worth Rp 31,818,743,000. While of the same time, in-land fishery production reached 1,007 tons worth Rp 1,176,375,000,-- See Table III-14.

The annual fish consumption rate has not reached the national nutrition per capita standard which is 29.5 Kg. In addition, fish consumption is still not even, the mosth were consumed by the people in the coastal area.

Smallholder fish marketing is to meet local needs both in fresh fish and salted fish. The marketing of fresh fish and salted fish in remote areas such as in Wamena, Mindiptana and other places has not run smooth yet due to expensive cost of transport. Shark fins from Merauke are marketed to Ujung Pandang and Surabaya, and dried anchovies from Sorong and Fak-Fak constitute another inter-island sea fishery product. Irian Jaya exports shrimps, tuna, cakalang (local species of tuna) oysters, shark fins and crocodile skin.

In 1982, the total production and export value declined, owing to the international economic recession. See Table III-15.

c. Animal Husbandry

Irian Jaya has a substantial potential of animal husbandry, because it has a large area of steppe totaling 4,434,000 ha. It is profitable for herbivora husbandry while the cattle population density in Irian Jaya is still low with only 0.40 head per sq km. See Table III-16.

Produksi ikan pada tahun 1984 untuk ikan laut sebanyak 31.895 ton dengan nilai Rp31.818.743.000,-. Untuk ikan darat pada tahun yang sama sebesar 1.007 ton dengan nilai Rp1.176.375.000,-. Lihat Tabel III-14.

Tingkat konsumsi per kapita per tahun belum mencapai standar Gizi Nasional yaitu 29,5 Kg/tahun. Disamping itu konsumsi ikan belum merata, sebagian besar masih dikonsumsi di daerah pantai.

Pemasaran hasil perikanan rakyat terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal, baik dalam bentuk ikan segar maupun dalam bentuk ikan olahan. Untuk pemasaran ikan segar maupun ikan olahan ke daerah pedalaman misalnya, Wamena, Mindiptana dan daerah pedalaman lainnya belum lancar karena biaya angkutan yang mahal. Produk yang dipasarkan antar pulau mempunyai tujuan ke daerah Ujung Pandang dan Surabaya adalah Sirip Ikan Hiu dari Merauke, ikan teri kering dari Sorong dan Fak-Fak. Ekspor hasil perikanan dari Irian Jaya adalah berupa udang, cakalang, tuna, kulit kerang, sirip ikan hiu dan kulit buaya.

Pada tahun 1982 produksi dan nilai ekpor turun disebabkan kelesuan di pasaran di luar negeri akibat resesi. Lihat Tabel III-15.

Tabel / *Table III — 13*

PRODUKSI PERIKANAN IRIAN JAYA 1979 S/D 1983 (TON)
FISHERY PRODUCTION IN IRIAN JAYA, 1979 - 1983 (IN TONS)

No	Tahun *Years*	Produksi/*Production* Perikanan Darat (Ton) *Inland Fishery (In Tons)*	Perikanan Laut (Ton) *Sea Fishery (In Tons)*	Jumlah (Ton) *Total (In Tons)*
1.	1979	603,3	19.429,8	20.033,1
2.	1980	508,0	26.194,5	26.702,5
3.	1981	693,6	30.099,5	30.793,1
4.	1982	887,2	33.374,0	34.261,2
5.	1983	1.012,4	32.394,4	33.406,8

Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : The Fishery Division of Irian Jaya.

Tabel / *Table III — 14*

PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI PERIKANAN IRIAN JAYA PADA TAHUN 1981 - 1985
PRODUCTION VALUE OF FISHERY IN IRIAN JAYA DURING 1981 - 1985

Tahun *Year*	Produksi *Production*	Nilai *Value*	Produksi *Production*	Nilai *Value*	Produksi *Production*	Nilai *Value*
1981	30.099	27.635.390	696	461.427	30.795	28.096.817
1982	33.374	33.645.300	887	515.101	34.261	34.160.401
1983	29.487	29.768.569	1.014	1.037.493	30.501	30.806.062
1984	31.895	31.818.743	1.007	1.176.375	32.902	32.995.118
1985	*) 30.584	*) 34.125.450	*) 196	*) 313.590	*) 30.780	34.442.040

*Keterangan : *) Produksi dan nilai perikanan laut dan darat tahun 1985 angka sementara. Produksi (ton), dan Nilai dalam ribuan rupiah.*
Production and value of sea and in-land Fishery in 1985.
Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985
Source : Irian Jaya in Figures in 1985.

c. Peternakan

Irian Jaya juga mempunyai potensi pengembangan peternakan yang besar dimana padang alang-alang dan stepa tercatat lebih kurang 4.434.000 Ha. Keadaan ini sangat memungkinkan untuk diisi dengan ternak herbivora. Dan kepadatan ternak ternak di Irian Jaya masih sangat rendah yaitu 0,40 ekor. Lihat Tabel III-16.

Pada tahun 1963 Pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan bantuan berupa sapi Jenis Onggole sebanyak 150 ekor, sapi Bali 50 ekor untuk Merauke dan pada tahun 1966 populasi ternak tersebut berkembang menjadi 350 ekor. Sedangkan perkembangan populasi ternak pada Pelita II rata-rata tiap tahunnya mencapai 6,2%. Dengan memperhatikan perkembangan yang cukup baik maka dilaksanakan droping ternak sapi di daerah kantong-kantong produksi yang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan termasuk **breed drough master** dan Brahman Croos. Adapun jenis sapi perah hanya terdapat beberapa ekor bagi keperluan konsumsi sendiri yaitu untuk para Missionaris di Jayapura dan Wamena dengan jenis FH dari Holland.

Ternak kerbau baru dalam tahap pengenalan yang jumlahnya hanya beberapa ekor di Manokwari pada tahun 1969, dan pada tahun 1970 di Jayapura dan Merauke. Kemudian pada tahun 1983 jumlah ternak kerbau ini sudah mencapai 285 ekor. Ternak kuda terbanyak di daerah Merauke yang dimanfaatkan sebagai kuda beban dan tunggang. Populasinya tahun 1982 mencapai 2.852 ekor. Ternak kambing tiap tahun berkembang 12% di Fak-Fak, sedangkan pada tahun 1970 dapat mencapai 38,6%.

Untuk keperluan pengenalan domba pada tahun 1980 dari bantuan Presiden untuk Kabupaten Jayawijaya sebanyak 1.361 ekor yang secara umum mengalami penurunan populasi sekitar 50%, terdiri dari jenis Suffok dan Dormer 24% dengan 24% dana evaluasi selama 21 bulan. Populasi kedua untuk jenis domba ini tahun 1983 tinggal 584 ekor.

Ternak babi selain jenis-jenis asli yang banyak diternakkan oleh masyarakat, dikenalkan pula jenis-jenis unggul baru oleh Pemerintah ditempatkan di Kampung Harapan dengan breed sadle back dan telah menghasilkan lebih dari 400 ekor dan dikirim ke seluruh Daerah Tingkat II dan telah menyebar pula ke Propinsi Dati I Maluku.

Ternak unggas yang dikembangkan adalah ayam kampung, ayam ras, itik dan entog. Ayam kampung telah menjadi populasi 617.152 ekor dengan perkembangan rata-rata satu tahun 1%, sedang untuk ayam ras mencapai 128.185 ekor (tahun 1982), itik 24.400 ekor dan entog sebanyak 28.750 ekor. Dalam usaha perbaikan gizi masyarakat juga diintroduksikan ternak kelinci terutama di daerah pedalaman.

Tabel / *Table III — 15*

REALISASI EKSPOR HASIL PERIKANAN DARI IRIAN JAYA TAHUN 1979 S/D 1983
EXPORT REALISATION OF FISHERY PRODUCTION OF IRIAN JAYA, 1979 - 1983

Tahun *Year*	Volume (Ton) *Volume (Ton)*	Nilai (1000 US$) *Value (thousand US $)*	Nilai (1000 Rp) *Value (thousand US $)*
1979	8.399	27.433	18.380.110
1980	9.232	27.900	18.693.000
1981	9.485	28.163	18.869.210
1982	8.432	24.324,628	16.540.747
1983	13.143,9	32.000	31.040.000

Sumber : Dinas Perikanan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : The Fishery Division of Irian Jaya.

Tabel / *Table III — 16*

PADANG RUMPUT ALAM YANG TERSEDIA DI BEBERAPA DAERAH DI IRIAN JAYA
THE AVAILABLE STEPPE IN IRIAN JAYA

No.	Kabupaten *Districts*	Lokasi *Locations*	Jenis Ternak *Species*	Luas (Ha) *Area*
1	2	3	4	5
1.	Jayawijaya	Wamena	Sapi/*Cow* Domba/*Sheep*	3.000
2.	Manokwari	Kebar	Sapi/*Cow*	5.000
3.	Manokwari	Manokwari	Kerbau/*Buffalo*	300
4.	Manokwari	Oransbari	Kerbau, Sapi/ *Buffalo, Cow*	600
5.	Manokwari	Mime	Sapi/*Cow*	3.000
6.	Paniai	Nabire	Sapi/*Cow*	1.200
7.	Jayapura	Grime Sekoli	Sapi, Kerbau/ *Cow, Buffalo*	7.000
8.	Merauke	Digul	Kerbau/*Buffalo*	2.000.000
9.	Merauke	Kumbe	Sapi/*Cow*	10.000
10.	Merauke	Timur Merauke	Sapi/*Cow*	90.000

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : The Animal Husbandry of Irian Jaya Province.

Untuk sapi Bali rata-rata angka populasi sekitar 26%, angka kematian 1,6% dan Calf Corp sebesar 22,3%. Dan populasi sapi secara keseluruhan mencapai 6,4%; kambing 3,4%; domba 9,8%; babi 10,6%; itik 17,4%; ayam kampung 9%; ayam ras 3,69%, entog 12,8%; dan kelinci 19,1% serta kuda sebesar 17,1%. Lihat Tabel III-17 dan III-18.

Tabel / *Table III — 17*

PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DI IRIAN JAYA SELAMA PELITA III
DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No	Jenis Ternak *Kinds of livestock*	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sapi/*Cattle*	10.200	12.359	9.848	12.522	14.449	17.126
2.	Kerbau/*Buffalo*	37	42	30	34	265	256
3.	Kuda/*Horse*	1.738	2.665	2.665	2.745	2.852	2.917
4.	Kambing/*Goat*	12.271	14.671	13.362	14.090	14.957	17.920
5.	Domba/*Sheep*	1.307	1.806	2.157	2.606	1.820	1.450
6.	Babi/*Pig*	225.664	228.033	355.506	356.000	375.000	361.440
7.	Ayam Kampung *Pedigree chicken*	453.191	477.981	430.491	556.194	617.152	48.700
8.	Ayam Ras/Tlr *Improved chicken*	150.394	83.000	85.438	93.725	128.185	172.200
9.	Itik/*Duck*	18.824	24.214	22.207	23.700	24.400	18.860
10.	Entog/*Manila Duck*	15.305	24.680	26.116	2.730	28.750	30.060
11.	Kelinci/*Rabbit*	203	170	146	115	10.600	

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Dati I Irian Jaya.

Source : Veterinary Division of Provincial Office of Irian Jaya Province.

Tabel / *Table III — 18*

PRODUKSI DAN KONSUMSI DAGING DAN TELUR DALAM PELITA III IRIAN JAYA
MEAT AND EGGS PRODUCTION AND CONSUMPTION IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No Komoditi *Commodity*	1978	1979	1980	1981	1982
1. Produksi/*Production*					
- Daging/*Meat (Ton)*	2.140,4	2.542,6	2.980,5	3.135,8	3.348,7
- Telur/*Eggs (Ton)*	1.212,3	905,5	84,2	898,7	962,4
2. Konsumsi/*Consumption*					
- Daging/(Kg/kapita/tahun) *Meat (Kg/capita/year)*	2,8	3,4	3,5	3,5	3,86
- Telur (Butir/kapita/tahun) *Eggs (Number/Capita/Year)*	8,9	13,1	13,1	14,4	14,12

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Vaternary Division of Provincial Office of Irian Jaya Province.

Walaupun produksi sudah meningkat, namun kebutuhan pangan asal ternak di Irian Jaya belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Hal ini disebabkan oleh pemotongan ternak yang tinggi yang menghambat pertumbuhan populasi serta terpaksa ada pemasukan produk peternakan dari luar Propinsi Irian Jaya. Lihat Tabel III-19.

Perkembangan perluasan kesempatan kerja yang terserap. Penyerapan tenaga kerja serta perluasan pemilikan ternak dititikberatkan pada petani yang mempunyai kemauan dan terampil dengan terlebih dahulu diberikan latihan/kursus yang kemudian diteruskan dengan bimbingan dan penyuluhan.

Kegiatan operasional pembangunan peternakan dengan cara mengontrakkan ternak kepada para petani yang telah dididik tersebut menyerap kerja sebagai pelaksana maupun tenaga harian selama Pelita III menunjukkan perkembangan : Pada tahun 1979 menyerap 947 orang (pengontrak) melibatkan 4.735 orang tenaga pelaksana); Tahun 1980 menyerap 1.925 orang melibatkan 9.635 orang; Tahun 1981 menyerap 3.476 orang melibatkan 47.958 orang; sedangkan pada tahun 1982 menyerap sebanyak 6.270 orang yang melibatkan 31.350 orang.

Untuk penyakit hewan yang agak serius di Irian Jaya adalah penyakit ND dan Fowl Pak pada ayam dan acabies bagi kambing, domba dan babi. Kematian ayam kampung akibat penyakit tersebut diperkirakan sebesar 5%/tahun. Penyakit-penyakit lain yang terdapat pada hewan adalah parasit seperti endoparasit, penyakit Cysticercosis pada babi terdapat di Pantai dan Jayawijaya. Mengenai laboratorium yang ada dalam type B di Jayapura dan type C di Biak, Sorong dan Merauke.

d. Perkebunan

Pembangunan komoditi perkebunan sampai pada tahun 1970 di Propinsi Irian Jaya masih melanjutkan pembangunan sebelumnya yaitu

In 1963, the Government had provided 150 Onggole cows and 50 Bali Cows for Merauke and in 1966 the cattle population increased to 350. The growth of cattle population during Pelita II reached an average of 6.2% annually. In view of the good prospect of cattle breeding, Government had provided prime cattle breed included breed drough master and Brahman Cross to isolated areas. The milchcows were only available in Jayapura and Wamena (FH from Holland) kept by the foreign missionaries for their own consumption.

The water buffalo breeding in its introduction phase numbered only very little in 1969 in Manokwari, and in 1970 it was introduced in Jayapura and Merauke. Further on in 1983 the number of buffaloes because 285. Horse raising was mostly in Merauke for the purpose of transportation means. In 1982, the total number of the horse population reached 2,852. Goat husbandry had increased by 12% annually in Fak-Fak, whereas in 1970 it reached 38.6% annually.

As to the sheep husbandry, in 1980, the 1,361 sheep donated through Presidential Aid programme for Jayapura had decreased by 50% in 21 months effecting the Suffok and Dormer Species each 24%. The total number of the two sheep species in 1983 remained 584.

Many people raise pedigree pigs, while the Government has also introduced new superior pig breed through saddlebacked breed at Kampong Harapan, which has produced more than 400 pigs. Many of them have been distributed to every district throughout the Province and even to the Province of Maluku.

Poultry breeding developed in this region includes pedigree chicken, improved chicken, ducks and Manila ducks. The population of pedigree chicken in 1982 was recorded 617,152 compared to 556,194 in the previous year, or an increase by 1%, while that of improved chicken, ducks and Manila ducks was respectively 128,185, 24,400 and 28,750. Besides, rabbit breeding has also been introduced particularly in hinterland areas to improve nutrition of the community.

The average increase of Bali cattle population was about 26% and its death rate was recorded 1.6%, calf corp 22.3%. In general the population of cattle increased by 6.4%, goats by 3.4%, sheep by 9.8%, pigs by 10.6%, ducks by 17.4%, pedigree chicken by 9%, improved chickens by 3.69%, Manila ducks by 12.8%, rabbits by 19.1% and horses by 17.1%. See Tables III-17 and III-18.

The production of meat and eggs has indeed experienced an increasing trend, however it was still insufficient to meet the local needs due to its high level of slaughtering that hinders the growth of livestock population. Therefore, to meet the said insufficiency the region has been buying these commodities from other regions. See Table III-19.

Tabel / *Table III — 19*

PEMASUKAN TERNAK & BAHAN MAKANAN ASAL TERNAK DI IRIAN JAYA SELAMA PELITA III (EKOR/TON)
SUPPLY OF SLAUGHTERED LIVESTOCK, MEAT, EGGS AND MILK TO IRIAN JAYA FROM OTHER REGIONS DURING PELITA III

No	Jenis Komoditi *Kinds of commodities*	1978	1979	1980	1981	1982
1.	Sapi Potong (ekor)/ *Slaughtered cattle (heads)*	2.215	1.448	1.787	2.804	2.420
2.	Kambing Potong (ekor) *Slaughtered goat (heads)*	167	583	258	144	158
3.	Telur Ayam (butir)/ *Chicken eggs (number)*	167.700	1.464.575	86.480	984.950	809.780
4.	Telur Itik (butir)/ *Duck eggs (number)*	7.500	12.500	49.700	54.400	20.000
5.	Daging Es (Kg)/ *Frozen meat (Kg)*	17.334	162.028	200	78.595	59.884
6.	Korned (Kg)/ *Corned beef (Kg)*	14.584	7.440	15.816	—	83.580
7.	Ayam Es (Kg)/ *Frozen chicken (Kg)*	19.333	4.634	222	63.840	48.000
8.	Susu (Kg)/*Milk (Kg)*	59.166	75.229	53.460	—	188.330

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Vetinary Division of Provincial Office of Irian Jaya Province.

In intensifying livestock breeding in the region much attention has been given to strong motivated and skillful breeders through the provision of opportunities to them to expand and improve their undertakings. For this purpose trainings and courses as well as guidances and fosterings have been provided as well. Further, such expansion in expected to be able to augment job opportunity.

The development in animal husbandry by practising production sharing system to post-trained breeders has shown an encouraging progress: through this system there were 947 contractors, employing abcut 4,735 workers, in 1979, which increased consecutively to 1,925 contractors with 9,635 workers

pada masa Pemerintahan Belanda. Komoditi perkebunan yang dikembangkan pada masa ini ialah coklat di (Sarmi, Syabron, Warmare, Wandamen, Ransiki, Nimboran dan Pulau Yapen), karet di (Akimuga, Muting, Endera, Mappi, Digul, Muyu Sausapor), kopi di Moanemani, Bokondini, Kebar, dan Ayamaru).

Dalam Pelita I boleh dikatakan pola pengembangan budidaya perkebunan baru bersifat partial. Pembinaannya masih bersifat terbatas ataupun sebagian-sebagian misalnya hanya penyediaan bibit dan adanya penyuluhan.

Pada tahun kedua Pelita I di Propinsi Irian Jaya terbentuk seksi perkebunan dengan kebijaksanaan pembangunan, dengan mengikuti "TRIDHARMA PERKEBUNAN", yaitu : Penciptaan lapangan kerja; Peningkatan pendapatan devisa; dan pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan. Bentuk kegiatan dan pelaksanaan pembangunan berupa rehabilitasi/peremajaan, intensifikasi dan perluasan tanaman dengan pengerahan potensi dan pengarahan dana-dana yang berbentuk anggaran Pemerintah, kredit dalam dan luar negeri serta dana masyarakat. Kebijaksanaan pengembangan budidaya di Irian Jaya diarahkan pada budidaya yang bersifat sosial. Budidaya yang mempunyai prospek baik; dan budidaya yang mempunyai income usaha yang tinggi.

Pada permulaan Pelita II kebijaksanaan pembangunan perkebunan sudah mulai dirintis melalui pendekatan secara terpadu dengan membentuk wadah Unit Pelaksana Proyek (UPP/PMU - Project Management Unit). Dalam hal ini diharapkan pembinaan dapat dilaksanakan secara terpadu, terpusat, dan pendekatan dari berbagai tehnis produksi.

Namun karena keterbatasan dana, pola ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dengan demikian dalam periode Pelita I UPP yang ada di Irian Jaya sebanyak 9 buah (kelapa 4 unit, karet 1 unit, coklat 3 unit, pala 1 unit) masih bersifat pra-UPP.

Aktifitas yang dilakukan pada pra-UPP ini baru meliputi inventarisasi, penyuluhan dan pemantapan data guna menunjang UPP yang lebih mantap. Dan pada tahun pertama Pelita III oleh Departemen Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan telah disetujui 3 Unit Pelaksana Proyek (UPP) Pusat Pembinaan Kepala (PPK) di Irian Jaya al. di Dati II Jayapura, Sorong, Merauke. Dalam pelaksanaan UPP-PPK Pemerintah telah berhasil memobilisir dana dari Dana Tanaman Ekspor (DTE), dana-dana kredit dari Bank. Dimana dana DTE disediakan untuk pembinaan (overhead-cost) sedangkan dana kredit disediakan untuk pelaksanaan lapangan (on farm cost).

Sejalan dengan usaha Pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan budidaya tanaman perkebunan, tahun 1980/1981 UPP Irian Jaya telah diperluas kepada tanaman coklat sebanyak satu unit dan kopi satu unit. Dalam satu unit UPP-PKK dapat diperluas tanaman kelapa seluas 50 Ha, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pengolahan dan pemasaran ditangani UPP-PPK secara terpadu. Dalam pada itu juga pembinaan terhadap budidaya tanaman perkebunan lainnya tetap berjalan baik. Disamping pengembangan perkebunan yang dilaksanakan Pemerintah dalam Pelita III sudah mulai dilaksanakan kegiatan perkebunan coklat PT Cokran Ransiki, PTP II Tanjung Morawa membuka kelapa sawit dan coklat di Prafi dan Arso.

Luas lahan usaha laboratorium di Propinsi Irian Jaya 14.389.800 Ha (35%) dari luas wilayah Irian Jaya), yang tersebar di Kabupaten, dengan perincian sbb. : Lahan Usaha Utama I (30 - 100 dpl) = 5.862.500 Ha; Lahan Usaha Utama II (100-500 m dpl) = 5.104.100 Ha; Lahan Usaha Utama III (500-1.000 m dpl) = 3.423.200 Ha.

Dari potensial lahan usaha tersebut hingga Pelita III telah dipergunakan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan petani perkebunan dan perluasan kesempatan kerja; meningkatkan produksi guna peningkatan ekspor hasil-hasil perkebunan serta mendukung pembangunan industri; meningkatkan pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Usaha-usaha pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud adalah dengan memperluas areal perkebunan, peremajaan tanaman yang tidak produktif, rehabilitasi, intensifikasi serta diversifikasi.

Perluasan areal perkebunan yang sudah dicapai dalam Pelita III adalah sbb. : Kelapa 1.548 Ha; kopi 1.028 Ha; karet 109 Ha; kapuk 3 ha; kina 1 Ha; pala 1.356 Ha; teh 1 Ha; cengkeh 3.893 Ha; coklat 1.057 Ha; dan jambumete seluas 175 Ha.

Penanganan luas lahan usaha perkebunan tersebut dilaksanakan oleh Perkebunan Rakyat, Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Swasta seluas 35.153 Ha dengan berbagai jenis komoditi. Dengan demikian maka sisa lahan usaha yang belum digunakan adalah seluas 14.389.800 Ha - 35.153 Ha = 14.236.422 Ha. Lihat Tabel III-20 dan III-21.

Volume ekspor/antar pulau bagi Perkebunan Rakyat s/d tahun keempat Pelita III di Propinsi Irian Jaya setiap tahun nampaknya masih terdapat fluktuasi yang baik dan turun tapi jika dibanding dengan

in 1980, 3,476 contractors with 47,958 workers in 1981 and 6,270 contractors with 31,350 workers in 1982. Thus, this system has also contributed its share in easing the unemployment problem which the region is facing.

Animal diseases which are rather commonly found in this region are among others ND and fowl pest (chicken) and scabies (goat, sheep, and pig). ND and fowl pest is estimated to account for the death toll of chickens about 5% per annum. Other animal diseases are caused by some kinds of parasit such as doparasit, cysticercosis etc which are commonly found in the coastal areas and Jayawijaya mountain range. In the meantime class-B veterinary laboratory is available in Jayapura and class-C veterinary laboratory in Biak, Sorong and Merauke.

d. Plantation

Plantation commodities available in this region up to 1970 had been still those that developed during colonial era of the Dutch. Commodities which have been recently developed are among others cacao (in Sarami, Syabron, Warmare, Wandamen, Ransiki, Nimboran and Yapen Island), rubber (in Akimuga, Muting, Endera, Mappi, Digul, Muyu and Sausapor), and coffee (in Moanemani, Bokondini, Kebar and Ayamaru).

Developmental pattern on plantation developed during Pelita I had been still partial indeed, and its promotion was limited to the provision of seeds and councellings. In the second year of the same Pelita, a plantation section within the Provincial Office was set up to deal with Tridharma Perkebunan (tri-endeavours of plantation) i.e. the creation of employment opportunities, the increase of foreign exchange, and the maintenance of natural resources and environment preservation. In this context include development activities which had been conducted to include plant rehabilitation or rejuvenation, intensification programme and expansion of planting, the financing of which originated from provincial and state budgets, domestic and foreign credits, and community sources. The development in the field of plantation in the region has been aimed at social undertakings, undertakings with good prospect and those which will give higher income for the farmers.

Since Pelita II the development in the field of plantation has been implemented integratedly through the Project Management Unit scheme, By such scheme the promotion on plantation could also be conducted integratedly and centrally, using technical production approach. In fact, this scheme has been indeed running unsmoothly due to limited funds available.

Therefore, there were only 9 pre-Project Management Units throughout the region, comprising 4 units is coconut plantation, 1 unit in rubber plantation, 3 units in cacao plantation and 1 unit in nutmeg plantation during Pelita II. Activities conducted by such pre-Project Management Units were limited to inventory, promotion and data improvement.

In the first year of Pelita III the Department of Agriculture c.q. the Directorate for Plantation approved the establishment of 3 Head Promotion Centres for Project Management Units located each in the District of Jayapura, Sorong and Merauke. For their operation the Government has successfully mobilised funds from the Export Crop Fund for financing their overhead-cost and from bank loans to settle farm cost.

In fiscal year 1980/1981 the number of Project Management Unit increased by one each in cacao plantation and coffee plantation. In addition to the state-run plantations there has been a private enterprise dealing with plantations, namely Cokaran Ransiki Plantation Limited Company which develops cacao plantation. While Tanjung Morawa state-run plantation corporation has also develop palm plantation in Prafi and cacao in arso.

The Province's potential area for plantation during Pelita III was 14,389, 000 ha, or 35% of its total land area, scattering in 9 districts. Out of it about 5,862,500 ha were situated within an elevation of about 30 ton 100 m above sea level, 5,104,100 ha within 100 to 500 m and another 3,425,200 ha within 500 to 1,000 m.

During Pelita III alone the coconut plantation area had expanded by 1,548 ha, coffee by 1,028 ha, rubber by 109 ha, quinine by 1 ha, nutmeg by 1,356 ha, cacao by 1,057 ha and cashew nut by 175 ha, making the total area of plantation to 35,153 ha of various crops owned by smallholders, state-run and private plantation enterprises, leaving another 14,236,422 ha still uncultivated. See Table III-20.

The region's export and inter-insular trade volumes of plantation commodities during Pelita III experienced a fluctuating trend, but they scored better than these of Pelita II. Altogether the total production of 5 plantation commodities (coconut, nutmeg, cocoa, cloves and rubber) during Pelita III was 2,212, 131 tons, compared to 2,515 tons during Pelita II. See Table III-22.

In the meantime, up to the final year of Pelita III there were 365,870 seedlings of coconut, 1,237,000 of coffee, 62,500 of quinine, 152,000 of nutmeg, 220,000 of sugar cane, 4,500 of tea, 745,000 of cloves, 1,662 of cacao, and 75,000 of cashew nuts distributed.

In general the region's farmers still need guidance, training, supervision and the like to cultivate, maintain as well as market their products. In this

Tabel / *Table III — 20*

AREAL TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT DALAM PELITA III DI IRIAN JAYA
AREA OF SMALLHOLDERS' PLANTATION CROPS IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No	Komoditi / *Commodity*	Luas Areal (Ha) / *Extent of area (ha)* 1979	1980	1981	1982	Pelita II
1.	Kelapa/*Coconut*	16.748	18.536	18.820	19.109	16.532
2.	Pala/*Nutmeg*	4.903	5.351	5.115	4.879	4.850
3.	Coklat/*Cacao*	1.512	1.621	1.644	1.667	1.361
4.	Cengkeh/*Cloves*	3.022	2.987	3.228	3.440	1.616
5.	Karet/*Rubber*	1.362	1.353	1.365	1.376	1.339
6.	Kopi/*Coffee*	426	437	472	508	423
7.	Kapuk/*Kapok*	78	73	73	75	71
8.	Jambumete/*Cashew nuts*	17	160	200	222	-
9.	Tebu/*Sugar cane*	-	-	57	97	-
	Jumlah / *Total*	28.026	30.518	30.968	31.373	26.192

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of the Regional Fourth Five-Year Development Plan of Irian Jaya Province.

keadaan pada Pelita II terdapat kenaikan yang cukup berarti. Seperti untuk 5 (lima) komoditi perkebunan (kelapa, pala, coklat, cengkeh, dan karet), yang secara keseluruhan menunjukkan keadaan sbb. : Pada Pelita II sebesar 2.515 ton, kemudian pada tahun keempat Pelita III meningkat menjadi 2.212.131 ton. Lihat Tabel III-22.

Sedangkan pengadaan benih/bibit dari berbagai sumber biaya yang dapat dicapai sampai Pelita III (PRPTE, P2DT dan PH Propinsi Irian Jaya) sebagai berikut : Kelapa 365.870 buah; kopi 1.237.000 buah; karet 62.500 buah; kapuk 1.000 buah; kina 32.500 buah; pala 152.000 buah; tebu 220.000 buah; ten 4.500 buah; cengkeh 745.000 buah; coklat 1.662 buah dan jambumete 75.000 buah.

Umumnya petani di Irian Jaya masih sangat memerlukan pembinaan baik berupa latihan, penyuluhan dan lain-lain sehingga mereka dapat melaksanakan pemeliharaan, pengolahan pada budidaya komoditi yang dimilikinya. Dalam Pelita III petani yang telah mendapat bimbingan/penyuluhan maupun latihan sebanyak 18.336 KK.

Mengenai pengadaan/penyediaan sarana produksi perkebunan dalam Pelita III telah dicapai untuk pupuk sebanyak 298.752 ton, dan obat-obatan sebanyak 27.638,5 ton. Untuk penyaluran sarana produksi terutama bibit, pupuk dan obat-obatan dalam Pelita III nampak meningkat. Penyaluran bibit yang pada Pelita II hanya sebanyak 1.561.634 batang, kemudian dalam Pelita III meningkat menjadi 3.249.832 batang, dan penyaluran obat-obatan dalam Pelita II sebanyak 2.245 Kg sedangkan dalam Pelita III meningkat sampai 30.500,5 Kg.

Perkembangan hasil produksi tanaman perkebunan Rakyat dalam Pelita III di Propinsi Irian Jaya meningkat cukup lumayan jika dibandingkan dengan keadaan pada Pelita II. Tanaman perkebunan kelapa yang pada akhir Pelita II sebesar 5.678 ton, meningkat pada akhir Pelita III menjadi 9.677 ton dengan luas panen mencapai 19.584 Ha. Sedangkan pala pada akhir Pelita III produksinya mencapai 704 ton, meningkat menjadi 903 ton pada akhir Pelita III (termasuk bunga pala) dengan luas panen mencapai 5.051 Ha. Begitu juga coklat yang pada akhir Pelita II terdapat produksi sebanyak 26 ton, pada akhir Pelita III melonjak menjadi 105 ton dengan luas panen mencapai 2.044 Ha. Sedangkan produksi kopi dan karet serta cengkeh juga produksinya mengalami peningkatan. Lihat Tabel III-23 dan III-24.

e. Kehutanan

Luas hutan di Propinsi Irian Jaya diperkirakan 75% dari luas daratan Irian Jaya. Luas hutan tersebut merupakan 64% dari luas WPU - D atau 30 persen dari luas hutan Indonesia.

Menurut fungsinya hutan di daerah ini direncanakan hutan lindung (27%), hutan produksi (35%), hutan lindung dan pelestarian alam sebanyak (26%) dan hutan yang dapat dikonservasi untuk kepentingan lain 9%.

Dari luas hutan produksi tersebut di atas, jumlah jatah tebangan tiap tahun jenis komersial yang diperbolehkan AAC (Annual Allowbel Cut) diperkirakan 4.382.080 M3. Jumlah AAC di Irian Jaya merupakan 8% dari AAC Nasional. Intensifikasi pengelolaan hutan di Irian Jaya masih sangat rendah, baik dilihat dari aspek potensi maupun aspek pemanfaatannya. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya tenaga dalam jumlah maupun ketrampilan, kondisi prasarana dan sarana yang belum memadai serta luasnya kawasan hutan serta topografi yang kasar.

Tabel / *Table III — 21*

AREAL PERKEBUNAN BESAR/SWASTA PTP DALAM PELITA III DI IRIAN JAYA
PLANTATION AREA OF STATE—RUN AND PRIVATE PLANTATION CORPORATIONS IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No	Komoditi / *Commodity*	Luas Areal (Ha) / *Extent of area* 1979	1980	1981	1982	Pelita II
1.	Kelapa sawit/*palm-oil*	-	-	-	-	-
	- PTP II Prafi/ *Prafi State-run Plantation Corporation II*	-	-	-	110	-
	- PTP III Arso/ *Arso State-run Plantation Corporation II*	-	-	-	-	-
2.	Coklat/*Cacao*					
	- PTP II Prafi/ *Prafi State-run Plantation Corporation II*	-	-	-	100	-
	- PTP II Cokran Ransiki/ *Cokran Ransiki State-run Plantation Corporation II*	-	100	247	293	-
	Jumlah / *Total*	-	100	247	503	-

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of the Regional Fourth Five-Year Development Plan.

Tabel / *Table III — 22*

VOLUME EKSPOR/ANTAR PULAU PERKEBUNAN RAKYAT DALAM PELITA III IRIAN JAYA
EXPORT AND INTER—INSULAR TRADE OF COMMODITIES PRODUCED BY SMALLHOLDERS' PLANTATION IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No	Komoditi / *Commodity*	Volume Ekspor (Ton) / *Export volume (Ton)* 1979	1980	1981	1982	Pelita II
1.	Kelapa/*Coconut*	1.553,207	1.090,950	2.366,100	1.539,173	1.817,-
2.	Pala/*Nutmeg*	562,003	629,153	655,370	384,062	583,-
3.	Coklat/*Cocoa*	37,039	47,438	72,250	102,110	26,-
4.	Cengkeh/*Cloves*	4,000	8,000	12,360	8,786	-
5.	Karet/*Rubber*	227,000	1.178,000	178,000	178,000	89,-
6.	Kopi/*Coffee*	-	-	-	-	-
7.	Kapuk/*Kapok*	-	-	-	-	-
8.	Jambumete/*Cashew nuts*	-	-	-	-	-
9.	Tebu/*Sugar cane*	-	-	-	-	-
	Jumlah / *Total*	2.384,149	1.953,541	3.284,080	2.212,131	2.515,-

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of the Regional Fourth Five-Year Development Plan.

context there were 18,336 heads of family who have had guidance, supervision, and trainings during Pelita III.

In line with the increase of crops productivity the supply of seedlings, and pesticides during Pelita III had also experienced an increase; from 1,561,634 stems of seedling of various crops during Pelita II to 3,249,832 during Pelita III, and from 2,245 kg of pesticides to 30,500 kg. While the total supply of fertilizer during Pelita III was 298,752 tons !

The outcome of smallholders's plantation commodities had also experienced a considerable rise during Pelita III. For instance, with its area of 19,584 ha the production of coconut rose from 5,678 tons at the end of Pelita II to 9,677 tons at the end of Pelita III; the production of nutmeg, with its area of 5,051 ha, augmented from 704 tons to 903 tons; the production of cocoa, with its area of 2,044 ha. grew from 26 tons to 105 tons. See Tables III-23 and III-24.

e. Forestry

The total area of forest in Irian Jaya is estimated 75% of the region's total land area, or about 30% of the country's total forest.

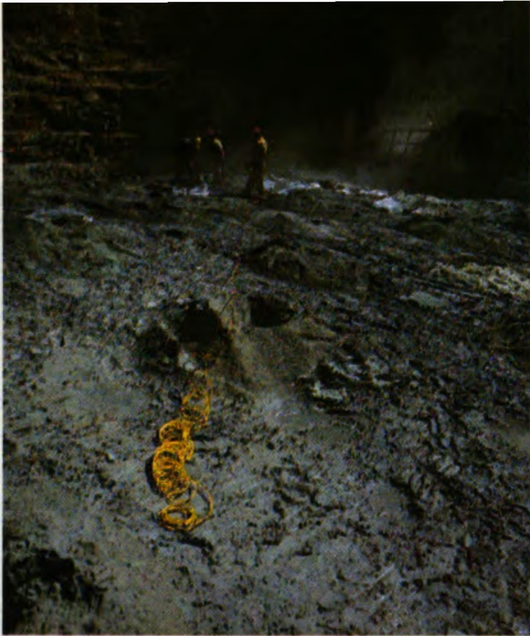
By its function the said forest is designated as follows : protected forest (27%), production forest (35%), reserved forest (26%) and conservable forest for other purposes (9%).

Of the production forests, the annual allowable felling of commercial wood species is estimated 4,382,080 m^3 of logs, or about 8% of the national annual allowable felling. Viewed from its potential and utilisation aspects the region has, such production is indeed relatively low. This is primarily caused by limited



Kegiatan pembangunan sektor industri kerajinan tangan, khususnya jenis ukiran dan seni pahat semakin mendapatkan posisi yang menggembirakan. Sementara itu, industri besar juga terus berkembang, sesuai tuntutan pembangunan di Irian Jaya.

The development of handicrafts industry, especially carving, occupies better position, while big-scale industry also continues to grow in line with the development progress in Irian Jaya.









Potensi Irian Jaya sebagai kawasan penghasil tambang cukup dirasakan. Salah satu jenis tambang yang menonjol ialah tembaga. Sisi lain dari kegiatan tersebut dapat direkam sebagaimana nampak dalam foto.

Irian Jaya is an outstanding region with mining potential. One of the leading mining products in this region is copper. Appearing on the pictures are other visions of mining activities.





Sebagai penghasil devisa, kegiatan pembangunan sektor pertambangan dan energi besar pengaruhnya bagi pembangunan daerah. Itulah sebabnya, propinsi Irian Jaya terus gencar memanfaatkannya. Dalam gambar nampak lokasi kegiatan di beberapa tempat.

As foreign exchange earner, Irian Jaya is much concerned with the development of mining and energy sector since this sector has given a very positive impact upon the regional development. For this reason Irian Jaya is actively taking the advantage of this potential. Pictures show locations of activities in a number of areas.









Kekayaan flora dan fauna, budaya serta keindahannya merupakan satu kesatuan utuh yang besar artinya bagi pengembangan wisata serta olahraga.

The rich floras, faunas, culture as well as the natural beauty in Irian Jaya constitute a perfect unity that is very potential to be promoted as tourist objects as well as for sports activities.







Menteri Transmigrasi Martono ketika mengunjungi lokasi transmigrasi di salah satu UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi), didampingi Gubernur Isaac Hindom. Kegiatan serupa juga sering dilakukan oleh aparat di bawahnya. Di beberapa tempat, khususnya daerah terpencil, arus listrik masuk desa telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

The Minister of Transmigration, Mr. Martono, visiting the location of transmigration at one of Transmigration Settlement Units. Also accompanying the Minister is the Governor of Irian Jaya, Mr. Isaac Hindom. Similar activities are also frequently conducted by the Minister's subordinate officers. In some areas, especially in remotest places, the rural electrification programme has directly touched the need of the people.













Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin mengenakan pakaian adat ketika meresmikan pemakaian pelabuhan udara Frans Kaisiepo. Gambar lain menunjukkan aktivitas kegiatan sarana angkutan perhubungan laut, darat dan udara yang semakin berkembang.

The Minister of Communication, Mr. Roesmin Nurjadin, in traditional costumes, inaugurating the operation of Frans Kaisiepo Airport. Other picture illustrate the activities of sea, land and air communications which are continuously growing.









Tabel / *Table III — 23*

PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT DALAM PELITA III DI IRIAN JAYA
PRODUCTION OF SMALLHOLDERS' PLANTATION COMMODITIES IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No Komoditi / *Commodity*	Produksi (Ton) / *Production (Ton)*				
	1979	1980	1981	1982	Pelita II
1. Kelapa/*Coconut*	10.755	11.160	18.734	42.080	5.678
2. Pala/*Nutmeg*	1.341	1.575	1.153	1.044	704
3. Coklat/*Cacao*	80	102	159	104	26
4. Cengkeh/*Cloves*	4	8	14	15	-
5. Karet/*Rubber*	276	285	285	285	106
6. Kopi/*Coffee*	24	64	62	62	48
7. Kapuk/*Kapok*	-	-	-	-	-
8. Jambumete/*Cashew nuts*	-	-	1	-	-
9. Tebu/*Sugar cane*	-	-	-	0,1	-
Jumlah / *Total*	12.480	13.194	20.407	43.590,1	6.562

Sumber : *Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.*
Source : Book of the Regional Fourth Five-Year Development Plan.

Tabel / *Table III — 24*

PERKEMBANGAN PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN YANG PENTING DI IRIAN JAYA TH. 1981 S/D 1985
IMPORTANT PLANTATION COMMODITIES OF IRIAN JAYA, 1981 - 1985

No Jenis / *Kind*	1981	1982	1983	1984	1985
1. Kelapa/*Coconut*	7.737	15.169	9.677	9.947	3.980
2. Biji Pala/*Nutmeg*	1.180	1.575	903	895	976
3. Cengkeh/*Cloves*	7	16	23	38	105
4. Karet/*Rubber*	289	285	283	330	265
5. Kopi/*Coffee*	81	66	64	63	153
6. Coklat/*Cacao*	161	104	105	178	370

Sumber : *Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985*
Source : Irian Jaya in Figures 1985.

Usaha-usaha yang ditempuh dalam mengelola potensi hutan di Irian Jaya ialah untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa : peningkatan mutu aparatur bidang kehutanan, mendorong peningkatan aktifitas swasta dalam rangka HPH dan melaksanakan program lainnya di bidang perlindungan dan pelestairan sumber-sumber alam.

Klasifikasi hutan di Irian Jaya terbagi dalam tipe hutan hujan dan hutan gambut, hutan rawa, hutan payau dan hutan pantai. Selain kedua tipe hutan tersebut dapat juga formasi lain seperti hutan nipa, hutan palma tanah rawa, hutan pada tanah podsol berpasir kwarsa/ hutan riperian atau savana.

Hutan dilihat dari produksi hutan di Irian Jaya pada tahun 1976 - 1980 produksi kayu rata-rata tiap tahun sebesar 308.783 m3. Angka tersebut sama dengan 1% dari produksi Nasional atau 7% dari AAC-nya.

Pembangunan sektor kehutanan dalam Pelita III yang telah dicapai adalah sbb. : Ground survai di Irian Jaya seluas 2 juta hektar; Survei udara di Jayapura seluas 600 ribu hektar; Penentuan kawasan hutan di Merauke seluas 98 ribu hektar sebagai suaka margasatwa, di Sorong seluas 163.945 hektar sebagai cagar alam dan Taman Wisata dan Taman Nasional di Jayapura dan Jayawijaya seluas 800 ribu hektar. Sedangkan pada tahun 1985/1986 luas Tanam Nasional di Kabupaten Jayawijaya seluas 2.100.000 hektar dan di Kabupaten Yapen Waropen seluas 390.000 hektar. Lihat Tabel III-25.

Penentuan Tata Guna Hutan Kesepakatan pada tahun 1982/1983 terdiri dari 8.311.820 Ha areal PPA; 8.648 Ha Hutan Lindung; dan sebanyak 4.732.360 Ha Hutan Produksi Terbatas sebanyak 7.123.480 Ha sebagai Kawasan Hutan; 11.775.420 Ha sebagai areal konservasi dan seluas 474.310 Ha untuk lain-lain. Lihat Tabel III-26.

Mengenai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan di Propinsi Irian Jaya selama Pelita III ialah seluas 200 Ha di Jayapura/ Jayawijaya, 10 Ha di Biak/Numfor, 10 Ha di Manokwari, 15 Ha di Sorong, 10 Ha di Merauke, 35 Ha di Wamena, 10 Ha di Paniai, 100 Ha di Lembah Baliem, dan 15 Ha di Jayapura yang dimaksudkan sebagai pengendalian perladangan. Di lembah Baliem, di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang luasnya sekitar 420.000 Ha terdapat tanah kritis seluas ± 96.200 Ha. Selain tanah kritis di daerah DAS Baliem juga terdapat tanah-tanah kritis di daerah lainnya yang belum diadakan studi.

Perkembangan hasil-hasil hutan selama Pelita III di Propinsi Irian Jaya dimana produksi dan ekspor kayu berjumlah 1.340.974,27 M (pro-

available manpower both in terms of number and skills, insufficient infrastructure and means of communications, its vast area and rough or unfavourable topography.

In managing the region's forest potential for the sake of the community's welfare, endeavours have been taken by among others promoting the quality of forestry personnel's abilities, stimulating private enterprises to manage it under the forest exploitation right scheme, and conducting other programmes related to protection and preservation of natural resources.

By type, the forest in this region can be classified into the rain forest, peat forest, swamp forest, mangrove forest, coastal forest, etc.

During the period of 1976 to 1980 the region's annual average timber production was recorded 308,783 m³, or accounting for 1% of national production or about 7% of its annual allowable felling.

Developmental achievements in the forestry sub-sector in the region during Pelita III were among others : ground surveys over 2 million hectares of the region's mass land, aerial surveys over 600 thousand hectares of land in Jayapura, designation of 98 thousand hectares of forests as wild-life conservation area in the territory of Merauke, 163,945 hectares of forest as natural preservation and recreational areas in Sorong, 800 thousand hectares of forest as national parks in Jayapura and Jayawijuya. In fiscal year 1985/1986 the extent of national parks in Jayawijaya District was 2,100,000 hectares and in Yapen Waropen District 390,000 hectares. See Table III-25.

Tabel / *Table III — 25*

LUAS TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGA, SUAKA ALAM DAN TANAH WISATA DI IRIAN JAYA TAHUN 1985/1986
THE EXTENT OF NATIONAL PARKS, WILD—LIFE CONSERVATION, NATURAL PRESERVATION AND RECREATIONAL FORESTS IN IRIAN JAYA IN FISCAL YEAR 1985/1986

No	Kabupaten / *District*	Taman Nasional / *National Park*	Swaka Marga / *Wild-life conservation forest*	Suaka Alam / *Natural Preservation forest*	Taman Wisata / *Recreational forest*
1	2	3	4	5	6
1.	Merauke	-	966.000	4.000	-
2.	Jayawijaya	2.100.000	-	750.000	-
3.	Jayapura	-	110.000	25.000	5.000
4.	Paniai	-	15.750	-	25
5.	Fak-Fak	-	-	129.000	-
6.	Sorong	-	3.000	156.300	15.000
7.	Manokwari	-	-	440.000	-
8.	Yapen Waropen	390.000	-	7.000	-
9.	Biak Numfor	-	-	2.200	-
	Irian Jaya	2.490.000	1.094.750	1.513.500	20.025

Sumber : *Statistik Kehutanan Propinsi Irian Jaya.*
Source : Forestry Statistics of Irian Jaya Province.

In fiscal year 1982/1983, the concensus of forest usage was identified as follows : natural preservation and conservation forest (PPA) 8,311,820 hectares, protected forest 8,648 ha, limited production forest 4,732,360 hectares, natural forest 7,123,480 hectares, conservation for est 11,773,420 hectares, and forest that can be converted 474,310 ha. See Table III-26.

Afforestation and regreening activities conducted in this Province during Pelita III had covered an area of 200 hectares in Jayapura/Jayawijaya, 10 hectares in Biak/Numfor, 10 hectares in Manokwari, 15 hectares in Sorong, 10 hectares in Merauke, 35 hectares in Wamena, 10 hectares in Panfai, 100 hectares in Baliem valley, and 15 hectares in Jayapura which was designed to protect horticultural areas.

At the same time, 96,200 hectares out of the 420,000 hectare Baliem river basin was in critical state. Such critical lands were also found in other parts of the region.

In view of its forest products the Province during Pelita III produced some 1,340,974.27 m of logs, of which some 1,614,169 m were exported, while the number of sawn timber totalled 50,636,667 m³. See Tables III-27 and III-28.

Forest exploitation development in the Province of Irian Jaya has been much sluggish indeed compared to that of other provinces. This has been caused by among others : most of the wood species growing here are unpopular in the world's market, rough topography with inappropirate means of transportation etc. Measures taken to accelerate the development have been by ways of : promoting studies on wood species traits and utilities, and creating pre-conditions which are able to stimulate private participation in forest exploitationright by reducing levies of MPHH, IHH, (Iuran Hasil Hutan = Forest Product Dues), IPEDA (Regional Development Tax) and by simplifying export procedures.

Tabel / *Table III — 26*

PERUNTUKAN HUTAN IRIAN JAYA MENURUT FUNGSINYA DIPERINCI MENURUT WILAYAH KABUPATEN
FOREST DESIGNATION BY FUNCTION AND DISTRICT IN IRIAN JAYA

No	Kabupaten / *District*	PPA	Lindung / *Protected forest*	P. Terbatas / *Limited production forest*	Produksi / *Production forest*	Produksi yang dapat dikonversi / *Production forest that can be converted*
1.	Jayapura	1.428.000	1.109.000	865.000	251.000	897.000
2.	Yapen Waropen	428.000	573.000	34.000	566.300	1.297.900
3.	Biak Numfor	88.750	55.000	62.100	61.000	24.000
4.	Manokwari	875.100	768.000	826.000	349.000	961.000
5.	Sorong	679.370	473.000	415.000	495.180	1.848.000
6.	Fak-Fak	1.180.000	706.000	1.108.240	661.000	1.607.000
7.	Paniai	568.000	1.850.000	480.000	251.000	978.000
8.	Jayawijaya	1.428.000	2.988.000	138.000	251.000	168.020
9.	Merauke	1.136.600	245.610	494.000	4.227.000	3.997.500
	Jumlah / *Total*	8.311.820	8.648.610	4.732.360	7.123.480	11.775.420

Peruntukan Hutan (Ha) / *Forest designation (Ha)*

Sumber : Statistik Kehutanan, Irian Jaya.
Source : Forestry Statistics of Irian Jaya Province.

duksi), sebanyak 1.614.169 M (ekspor), sedangkan untuk kayu gergajian sebanyak 50.636,667 M3. Lihat Tabel III-27 dan Tabel III-28.

Perkembangan pengusahaan hutan di Propinsi Irian Jaya berjalan lambat jika dibandingkan dengan perkembangan hutan di daerah-daerah Indonesia lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Keadaan hutan heterogen, yang ditumbuhi oleh beraneka ragam jenis kayu campuran dan sebagaian besar belum dikenal di pasaran dunia; (2) keadaan topografi lapangan yang berat dengan prasarana yang masih terbatas. Langkah-langkah yang diambil untuk mempercepat perkembangan pengusahaan hutan ini ialah dengan cara: (1) Meningkatkan usaha penelitian terhadap sifat dan kegunaan jenis-jenis kayu di Irian Jaya; (2) Menciptakan prakondisi yang dapat merangsang swasta dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan, seperti keringanan dalam pungutan MPHH, IHH, IPEDA dan penyerderhanaan prosedur ekspor.

Kegiatan Pengusahaan Hutan (HPH) di Propinsi Irian Jaya mulai tumbuh pada akhir Pelita II dan menjelang Pelita III. Pada tahun 1982/1983 tercatat sebanyak 15 buah perusahaan yang beroperasi dengan jatah produksi 803.000 M3, dan realisasi produksinya tercatat sebesar 312.252,12 M3, yang terlihat pada tabel III-28a. Sedangkan pada tahun 1985/1986 jumlah pemegang HPH di Propinsi Irian Jaya berjumlah 248, dengan produksi kayu gergajian sebanyak 17.932,579 M3, dan produksi kayu bulat sebesar 25.284,079 M3. Lihat Tabel III-28a dan III-29.

f. Pengairan

Propinsi Dati I Irian Jaya mempunyai banyak sungai, danau atau rawa yang potensial untuk dimanfaatkan bagi pengairan. Sampai kini baru sebagian dari potensi ini yang dimanfaatkan. Pemanfaatan yang telah dilakukan ialah untuk pertanian dalam usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi.

Pembangunan pengairan di Irian Jaya bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan potensi pengairan yang ada dengan membangun jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produksi di daerah transmigrasi dan daerah lainnya. Juga dilakukan usaha pengendalian daya rusak terhadap sumber,dan daerah pengairan.

Kegiatan pembangunan pengairan yang telah dilaksanakan selama Pelita III adalah berupa penelitian hidrologi, survey dan disain jaringan irigasi, pembangunan sistem irigasi sederhana dan pemanfaatan rawa. Dari kegiatan tersebut telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut : Pengumpulan data hidrologi dan hidrometri dari 6 (enam) Kabupaten, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Paniai, Manokwari dan Sorong. Untuk keperluan pengumpulan data tersebut sudah dibangun 15 buah AWLR, 15 buah ARR dan 6 (enam) buah stasiun klimatologi.

Pembangunan jaringan irigasi sungai Nimbu di Kecamatan Nimboran. Jaringan irigasi ini dimaksudkan untuk mengairi sawah sebanyak 954 Ha di daerah transmigrasi Besum. Bendung dengan konstruksi beton telah selesai dengan saluran induk. Pengembangan daerah rawa di Kurik Kabupaten Merauke seluas 400 Ha. Kegiatan yang dilakukan

Tabel / *Table III — 27*

PRODUKSI DAN EKSPOR KAYU
PRODUCTION AND EXPORT OF TIMBER

Tahun / *Year*	Kayu Bulat (M) / *L o g s (M)*: Produksi / *Production*	Eksport / *Exports*	Interinsular / *Inter-insular*	Kayu Gergajian (M3) / *Sawn timber*
1979/1980	210.621,54	415.522,66	14.622	14.225,133
1980/1981	411.741,67	315.621,21	8.260	15.303,115
1981/1982	435.861,33	373.425,75	24.762,62	21.108,667
1982/1983	282.749,23	511.600,00		
Jumlah/*Total*	1.340.974,27	1.614.169,52	47.644,62	50.636,667

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of the Regional Fourth Five-Year Development Plan.

Tabel / *Table III — 28*

HASIL HUTAN DAN KAYU
PRODUCTION OF MINOR FOREST PRODUCTS

Tahun / *Year*	Kopal (Kg) / *Copal (Kg)*	Minyak Lawang (Liter) / *Lawang oil*	Kulit Masoi (Kg) / *Masoi tree bark*	Rotan / *Rattan*
1979/1980	-	-		
1980/1981	-	1.550	38.000	31.431 batang Stics
1981/1982	-	1.200	136.702	-
1982/1983	10.440	-	1.042	13.000 batang + 19,1 ton Stics
Jumlah/Total	10.440	2.950 liter	175.744 Kg	44.431 batang Stics + 19.100 Kg

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of the Regional Fourth Five-Year Development Plan of Irian Jaya Province.

Tabel / *Table III — 28a*

REALISASI PRODUKSI KAYU BULAT AREAL HPH TAHUN 1982/1983
REALISATION OF LOGS PRODUCTION IN IRIAN JAYA IN FISCAL YEAR 1982/1983

No	Nama Perusahaan / *Name of enterprises*	Jatah Produksi (M3) / *Production Quota*	Realisasi Produksi (M3) / *Realisation*
1.	PT. Hanurata	60.000	31.411,12
2.	PT. Kayu Ekaria	210.000	55.930,48
3.	PT. Perdana Waropen	13.000	7.168,82
4.	PT. Inhutani II	120.000	94.418,82
5.	PT. Wukira Sari	18.000	6.549,94
6.	PT. Furama Utama	104.000	37.045,86
7.	PT. Cahaya Fasifik Dharma Timber	25.000	18.724,05
8.	PT. Agung Waihitam	19.000	14.866,98
9.	PT. Aneka Optima Inti	50.000	9.000,25
10.	PT. Batang Indah	20.000	-
11.	PT. Metropolitan	24.000	-
12.	PT. Nabire Raya	50.000	-
13.	PT. Teluk Ethna	90.000	23.401,26
14.	PT. Surya Raya Chandra	-	7.089,26
15.	PT. Phoenix Harapan	-	7.645,53
	Jumlah / *Total*	803.000	312.252,12

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Forestry Division of the Provincial Office of Irian Jaya.

Forest exploitation activities in Irian Jaya have been initiating since the final stage of Pelita II or early days of Pelita III. There were 15 enterprises holding forest exploitation rights (HPH) in this Province in fiscal year 1982/1983 with a total quota production of 803,000 m³ and production realisation of 312, 252.12 m³.See Table III-28a.

In fiscal year 1985/1986 the number became 248 HPH holders producing 25,284.079 m³ of logs and 17,932.579 m³ sawn timber. See Tables III-28a and III-29.

Tabel / *Table III — 29*

HASIL PRODUKSI KAYU BULAT DAN GERGAJIAN PEMEGANG HPH DI IRIAN JAYA TAHUN 1985/1986

NUMBER OF ENTERPRISES HOLDING HPH AND PRODUCTION OF LOGS AND SAWN TIMBER IN IRIAN JAYA IN FISCAL YEAR 1985/1986

No.	Kabupaten *District*	Jumlah pemegang izin HPH *Enterprises holding HPH permits*	Kayu / *Timber*	
			Gergajian *Sawn timber*	Bulat *Logs*
1	2	3	4	5
1.	Merauke	22	1 175	6 152,680
2.	Jayawijaya	33	5 914	522
3.	Jayapura			
4.	Paniai	85	8 943	540
5.	Fak - Fak	27	—	3 309,645
6.	Sorong	12	1 900,579	2 123,770
7.	Manokwari	31	—	10 318,260
8.	Yapen Waropen	9	—	832,254
9.	Biak Numfor	29	—	3 309,645
	Irian Jaya	248	17 932,579	25 284,079

Sumber : *Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985.*
Source : Irian Jaya in Figures 1985.

adalah rehabilitasi reservoir gali Ephasa dan rawa mago seluas 130 Ha, penggantian pompa air serta pembuatan saluran pembawa sepanjang 2.350 m. Jaringan irigasi sederhana di Jayapura, Manokwari, Nabire, Sorong, seluruhnya mengairi 835 Ha sawah dengan 9 (sembilan) buah bendungan, dan 5.319 m saluran induk, 14.205 m saluran sekunder serta 74 buah bangunan pelengkap.

Usaha pengembangan pengairan di masa Pelita IV ditujukan untuk menunjang pengembangan transmigrasi dan daerah-daerah pemukiman dalam usaha meningkatan produksi pertanian. Usaha yang ditempuh ialah : (1) Pembangunan jaringan irigasi di Kabupaten Jayapura, Manokwari, Merauke dan Sorong; (2) Pengembangan rawa di daerah Fak-Fak, Merauke, Jayapura dan Paniai yaitu di lokasi yang digolongkan lahan basah. Disamping itu diusahakan pula pengamanan terhadap bahaya banjir terhadap daerah-daerah aliran sungai di Jayapura, Nabire, Sorong, Manokwari dan Merauke.

Peranan pengairan dalam pembangunan umumnya dan pembangunan pertanian pada khususnya sangat penting karena Propinsi Irian Jaya mendapat prioritas dalam penempatan transmigrasi. Juga dimaksudkan menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat, pembangunan industri dan kelistrikan.

2. Industri

Pembangunan sektor industri di Propinsi Irian Jaya dewasa ini diarahkan kepada pengembangan industri untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang memanfaatkan sumber alam, energi dan tenaga kerja secara optimal. Pengembangan industri kecil dan kerajinan disamping industri kecil dan kerajinan disamping industri yang berskala menengah diusahakan agar tumbuh lebih luas. Tujuan dan sasaran pembangunan industri di daerah ini juga untuk perubahan struktur ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pengurangan ketergantungan kepada impor, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri dan pemanfaatan sumber daya dalam, energi dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan kondisi perindustrian di Irian Jaya pada akhir Pelita III dan prospek pemasaran hasil-hasil industri, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan industri menengah merupakan prioritas utama, terutama industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan (galian golongan C) dan industri kerajinan tangan tradisional.

Usaha dalam pengembangan dunia usaha diharapkan agar sektor swasta akan mengambil peranan serta aktif dalam penanaman modal sebagai tindak lanjut daripada kondisi perindustrian yang telah berhasil diciptakan guna mendorong terciptanya iklim yang baik bagi timbulnya lapangan usaha bagi wiraswasta.

Pembangunan sektor industri di Propinsi Irian Jaya sejak Pelita I hingga Pelita III menunjukkan hasil yang cukup baik dengan meningkatnya unit usaha investasi modal, nilai produksi dan penyerapan tenaga kerja. Rata-rata pertumbuhan unit usaha dalam Pelita I sebesar 20,9% per tahun, dan pada Pelita II 17,07% per tahun. Jumlah unit usaha yang telah mendapat ijin usaha hingga akhir Pelita III sebanyak 1.408 buah. Dan ditinjau dari investasi modal dimana pada Pelita I kenaikan

f. Irrigation

The Province has a number of rivers, lakes, and reservoirs potential for irrigation. However, at the moment only a small portion of it has been utilised for agricultural extensification and intensification programmes.

Irrigation development in this region is aimed at utilising and preserving as best as possible the existing potential of its water resources by among others constructing irrigation networks to augment crops production in transmigration and other areas. In relation to the said development, efforts have also been taken to prevent water resources and catchment areas from destruction.

Irrigation development activities conducted during Pelita III had been in the form of hydrological surveys, the making of irrigation networks designs, irrigation networks surveys, construction of simple irrigation system and the utilisation of swamps. The performances of those activities were among others: compilation of hydrological and hydrometrical data of 6 (six) districts (Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Paniai, Manokwari, and Sorong). In effort of collecting data 15 AWLR, 15 ARR and 6 climatological stations have been built.

To irrigate rice fields of 954 hectares in Besum transmigration area, a dam with its primary cannal and irrigation networks was constructed at the Nimbu river in the territory of Nimbran Sub-district. Other activities which have been carried out cover among others : the development of the 400-hectare Kurik Swamp; rehabilitation of Gali Ephasa reservoir and the 130-hectare Mago Swamp; replacement of water pumps and the construction of a 2,350 m canal, the construction of simple irrigation system with 9 dams, primary canals of 5,319 m in extent, secondary canals of 14,205 m and 74 suppliment structures, to irrigate about 835 hectares of rice fields.

During Pelita IV, irrigation development has been aimed at augmenting agriculture products at transmigration and other areas. In this context, efforts have been taken to include : the construction of irrigation networks in the Districts of Jayapura, Manokwari, Merauke, and Sorong; the development of swampy areas in Fak-Fak, Merauke, Jayapura and Paniai. Besides, it has been endeavoured to safeguard river basins in Jayapura, Nubira, Sorong, Manokwari, and Merauke from flood threats.

Irrigation in this region has in fact played an important role in general development and especially in agricultural development, and above all in relation to transmigration programme in which Irian Jaya is fixed as one of major transmigration destination areas. It is also designed to support the implementation of development programmes in the field of health, industry and electricity.

2. Industry

The development in the industrial sector in this Province is directed toward the expansion of industrial establishments particularly handicraft industries, small-and middle-scale industries, by using the optimum degree of the region's natural resources, energy and human resources in order to meet the needs of the people. The said development is also meant to change the region's economic structure, intensify job opportunity, equalise employment opportunity, reduce the dependence on imported goods, expand industrial centres, and maximise the utilisation of natural resources, energy and human resources.

In accordance with the existing industrial condition of the region and its marketing prospect of industrial products up to the end of Pelita III, the fostering and development of small-and middle-scale industries, especially industries processing products of agriculture, fishery, forestry, mining (Class-C quarrying) and handicraft industry, had been given first priority. In this context, the private sector is expected to play an active participation by investing capital in industrial establishments.

The development in the sector of industry in this region since the early stage of Pelita I up to the end of Pelita III had indicated a meaningful growth. The indication could be seen in the growing number of establishments, production value, and manpower enganged in the activites. The yearly average growth rate of establishments during Pelita I was recorded at 20.9 % and 17.07 % during Pelita II. While the number of establishments with operation permits up to the end of Pelita III was 1,408. In the meantime, based on the constant price of 1975, investment had been growing at a rate of 7.17 % on a yearly average during Pelita I, 6.02 % during Pelita I, 6.02 % during Pelita II, and 14.85 % during Pelita III. The yearly average growth rate of production had been at 42.02 % during Pelita I, 15.65 % during Pelita II, and 24.65 % during Pelita III.

In this region, small-scale manufacturing establishments are still very dominant. They are operating in food processing industry, textile and hide processing, chemicals, fibre, metal, transportation, services and construction materials.

In 1981, the production value of construction materials industries amounted to Rp1.691 billion (36.53%), food processing industries Rp1.490 billion (32,18%) and metal industries Rp1.113 billion (24.05%). The number of manufacturing establishments mentioned above was consecutively 646 in fiscal year 1979/1980. 832 in fiscal year 1980/1981, and 1,024 in fiscal year 1981/1982. See Table III-30.

The growth rate of manpower absorption by industrial sector during Pelita I was 38,31 %, during Pelita II 15.87 % and 21.42 % during Pelita III. The number of workers engaged in industrial sector in the early year of Pelita

rata-rata 7,17% per tahun, pada Pelita II sebesar 6,02% per tahun, Pelita III sebesar 14,85% per tahun, berdasarkan harga konstan tahun 1975.

Apabila ditinjau dari perkembangan produksi dan lain-lain berdasarkan harga konstan 1975 terlihat dalam Pelita I kenaikan rata-rata sebesar 42,02%, pada Pelita II sebesar 15,65% dan Pelita III sebesar 24,65% per tahun.

Dunia perindustrian di Propinsi Irian Jaya pada umumnya masih merupakan pengembangan kecil. Tingkat kegiatan produksi rata-rata masih dalam skala yang kecil. Bidang-bidang kegiatan dunia industri di Irian Jaya meliputi; (1) Pengelolaan pangan; (2) Sandang dan kulit; (3) Kimia dan serat; (4) Barang logam, alat angkutan dan jasa; (5) industri bahan bangunan dan umum. Keadaan pada tahun 1981 menunjukkan bahwa nilai produksi yang menonjol adalah industri bahan bangunan dan umum yaitu sebesar Rp1,691 milyar (36,53%), kemudian disusul industri pengolahan pangan sebesar Rp1,490 milyar (32,18%) dan industri barang logam bernilai Rp1,113 milyar (24,05%).

Dalam tiga tahun Pelita III unit usaha industri di lima kegiatan tersebut terdapat sebanyak 646 buah pada tahun 1979/1980, 832 buah pada tahun 1980/1981, dan 1.024 buah pada tahun 1981/1982. Lihat Tabel III-30.

Laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja dalam 5 (lima) sub sektor industri di Propinsi Irian Jaya dalam Pelita I sebesar 38,31%, pada Pelita II sebesar 15,87%, sedangkan dalam Pelita III sebesar 21,42%. Pada awal Pelita I jumlah tenaga yang bekerja di sektor industri sebanyak 361 orang dan pada Pelita III (tahun pertama) sebanyak 3.858 orang terdiri dari : pengolahan pangan 648 orang, sandang dan kulit sekitar 637 orang, di bidang kimia dan serat 103 orang, dan di bidang barang, logam serta alat angkutan sebanyak 942 orang, pada bidang bangunan dan umum sebanyak 1.528 orang. Kemudian pada akhir Pelita III jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan dunia industri meningkat menjadi 7.314 orang, yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten, Jayapura, Biak, Numfor, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Paniai, Yapen Waropen, dan Jayawijaya. Lihat Tabel III-31 dan III-32.

3. Pertambangan dan Energi

Kegiatan pembangunan sektor pertambangan utama ialah melakukan inventarisasi dan pemetaan eksploitasi kekayaan alam berupa sumber mineral dan energi. Dilihat dari segi pengembangan wilayah pertambangan menyediakan peta geologi yang digunakan sebagai data dasar untuk penataan wilayah dan daerah. Dengan demikian berarti kedudukan sektor ini dalam pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang kegiatan sektor-sektor industri, sektor perdagangan, koperasi, dan dunia usaha.

Tabel / *Table III — 30*

BIDANG—BIDANG KEGIATAN DUNIA INDUSTRI DI IRIAN JAYA, 1979 S/D 1982

KINDS OF INDUSTRY IN IRIAN JAYA DURING 1979 TO 1982

No.	Sektor Industri *Kinds of industry*	1979/1980	1980/1981	1981/1982
1.	Pengolahan pangan/*Food processing*	180	213	239
2.	Sandang & kulit/ *Textile and hide processing*	134	175	211
3.	Kimia dan Serat/*Chemicals and fibre*	8	10	10
4.	Barang, logam, Alat Angkutan dan jasa/ *Metal, transportation and services*	195	250	322
5.	Bahan bangunan dan umum/ *Construction materials and others*	129	184	242
	Jumlah / *Total*	646	832	1.024

Sumber : Kanwil Departemen Perindustrian Irian Jaya
The Regional Office of the Department of Industry of Irian Jaya Province.

Tabel / *Table III — 31*

JUMLAH TENAGA KERJA YANG TERSERAP DI BEBERAPA JENIS INDUSTRI DI IRIAN JAYA, 1979/1980 — 1981/1982

NUMBER OF MANPOWER ENGANGED IN SEVERAL KINDS OF INDUSTRY IN IRIAN JAYA, FISCAL YEAR 1979/1980 — 1981/1982

No	Jenis industri *Kinds of industry*	1979/1980	1980/1981	1981/1982
1.	Pengolahan Pangan/ *Food processing*	648	724	837
2.	Sandang dan Kulit/ *Textile and hide processing*	431	531	637
3.	Kimia dan Serat/*Chemicals and fibre*	78	88	103
4.	Barang Logam, Alat Angkutan dan Jasa/ *Metal, transportation and services*	942	1.093	1.450
5.	Bangunan dan Umum/ *Materials construction*	1.528	1.881	2.430
	Jumlah / *Total*	3.627	4.317	5.457

Sumber : Kanwil Departemen Perindustrian Irian Jaya
Source : The Regional Office of the Department of Industry of Irian Jaya Province.

Tabel / *Table III — 32*

PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENURUT JENIS, UNIT USAHA, JUMLAH TENAGA KERJA, NILAI INVESTASI, PRODUKSI DAN BAHAN BAKU DI PROPINSI DATI I IRIAN JAYA, 1985

DEVELOPMENT OF SMALL—SCALE INDUSTRIES, BY KINDS OF MANUFACTURING, NUMBER OF ESTABLISHMENTS, MANPOWER EMPLOYED, INVESTMENT VALUE, PRODUCTION AND RAW MATERIALS IN IRIAN JAYA, 1985

No.	Sub-sektor industri *Industrial sub-sector*	Unit Usaha *Unit of establishment*	Tenaga kerja *Manpower*	Nilai (Rp 000)/*Value*		
				Investasi *Investasi*	Produksi *Production*	Bahan Baku *Raw material*
1.	Pangan/*Food processing*	117	398	85.364	662.932	258.328
2.	Sandang dan kulit/ *Textile and hide processing*	64	196	41.463	335.466	60.875
3.	K i m i a/*Chemicals*	144	759	365.181	1.999.238	325.602
4.	Kerajinan/*Handicrafts*	57	115	143.515	119.032	43.115
5.	Logam/*Metal*	75	289	95.046	368.512	111.573
	Jumlah / *Total*	475	1 759	730.569	3.485.180	799.573

Sumber : Kanwil Departemen Perindustrian Irian Jaya.
The Regional Office of the Department of Industry of Irian Jaya Province.

Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang telah dikenal sebagai daerah potensial akan kandungan endapan mineral dan sumber daya energi. Namun, baru sebagian kecil saja endapan mineral dan sumber daya energi yang sudah diketahui dengan pasti tentang kuantitas dan kualitasnya, sedangkan sebagian besar belum diketahui.

Berdasarkan hasil penelitian serta pengamatan mengenai bahan galian, baik yang strategis (golongan A); Vital (golongan B) atau

I was 361, and rose to 3,858 in the first year of Pelita III, 658 of whom worked in food processing industries, 637 in textile and hide processing industries, 103 in chemical industries, 942 in metal industries and transportation services, and 1,528 in material construction industries. The number than rose to 7,314 workers at the end of Pelita III, scattering in 9 districts, namely Jayapura, Biak, Numfor, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Merauke, Paniai, Yapen Waropen and Jayawijaya. See Tables III-31 and III-32.

golongan C umumnya tersebar di seluruh Kabupaten Irian Jaya. Lihat Tabel III-33

Dari berbagai jenis bahan galian tersebut sampai kini sudah diusahakan/ditambang adalah : (a) bahan galian logam (tembaga); (b) Bahan galian bukan logam (gamping, lempung); dan bahan galian strategis (minyak bumi). Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sampai Pelita II di sektor pertambangan dan energi ialah melakukan penyelidikan, dan survey dan eksplorasi. Telah dilakukan penyelidikan umum dan eksplorasi pendahuluan beberapa bahan galian C, yaitu : (a) Eksplorasi endapan marmar di Sungai Wabarua dan Kwatisore (Kabupaten Paniai) dan armu (Kabupaten Jayapura). Eksplorasi bahan baku semen di Nafri dan Adepantai diperkirakan bahan-bahan tersebut kwantitas maupun kwalitasnya cukup potensial untuk dikembangkan; (c) Batu gamping terdapat di Jayapura, Biak, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Nabire dan Serui.; (d) Lempung (clay) terdapat di Manokwari dan Nabire. Hampir seluruh usaha pertambangan bahan golongan C adalah usaha rakyat yang dikerjakan secara manual dan teknologi sederhana; (e) Pemetaan geologi telah dilakukan di bagian barat sampai bagian Tengah atau ± 55% dari Propinsi Irian Jaya. Juga telah dilakukan pemetaan geologi sistimatis dengan skala 1 : 20.000 untuk daerah Manokwari dan Jayapura. (f) Geologi tata lingkungan, yang telah berhasil dilakukan inventarisasi potensi air tanah di sekitar Jayapura, Merauke dan Sorong dengan bendungan geolistrik. Hasil pemboran eksplorasi air tanah telah dimanfaatkan di daerah area, Abepantai, Kotaraja dan Sentani. Pemetaan geologi tata lingkungan telah dilakukan untuk daerah Timika Timur dengan skala 1 : 250.000 dan daerah Jayapura - Sentani dengan skala 1 : 63.600.

Masalah utama yang dihadapi dalam usaha meningkatkan kegiatan inventarisasi sumber daya mineral di Propinsi Irian Jaya adalah kurangnya tenaga listrik di Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi di Irian Jaya, yang mempersyaratkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus. Disamping itu transportasi dan komunikasi yang sulit keadaan geografi daerah yang sulit dijangkau merupakan hambatan dalam usaha peningkatan inventarisasi mineral.

a. Bahan Galian Logam

Pengusahaan biji tembaga di Irian Jaya dilakukan oleh **Freeport Indonesia Incorporated** yang terdapat 12 **Ertsberg** atau dikenal dengan **Tembagapura.** Kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan **Freeport Indonesia Incorporated** dituangkan dalam SK Presidium Kabinet Ampera RI Nomor 82/EK/Ken/1967, tanggal 7 April 1967. Kontrak karya ini merupakan yang pertama kali dalam bidang pertambangan di luar minyak bumi. Tambang tembaga Freeport diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 3 Maret 1973.

Pada kesempatan itu diresmikan pula nama Tembagapura untuk kota pertambangan tembaga di Irian Jaya. Sedangkan bijih tembaga di Tembagapura ditaksir 33 juta ton bijih tembaga dengan kadar rata-rata tembaga 2,5%, besi 41%, emas ± 0,75 gram setiap ton dan perak 9 gram setiap kota. Selain itu terdapat pula mineralisasi tembaga kira-kira satu kilometer ke arah timur gunung bijih (Ertsberg) yang dinamai gunung Bijih Timur (GBT), jumlah cadangan adalah 45 juta ton, yang dapat diusahakan secara tambang dalam 37.346.000 ton dengan kadar Cu = 2,34%. Lihat Tabel III-34.

b. Bahan Galian Bukan Logam

Bahan galian bukan logam (golongan C) yang sudah diusahakan/ditambang adalah batu gamping, yang terdapat di sekitar Jayapura, Biak, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Nabire dan Serui.
Umumnya penambangan batu gamping ini diusahakan oleh penduduk setempat, untuk dijadikan batu tela. Bahan galian lainnya adalah lempung yang diusahakan oleh rakyat setempat untuk bahan baku batu **bata merah, yang terdapat di Manokwari dan Nabire.**

c. Bahan Galian Strategis (Golongan A)

Bahan galian strategis yang terdapat di Irian Jaya, yang sudah diusahakan adalah minyak bumi. Selain PERTAMINA terdapat 7 (tujuh) buah kontraktor bagi hasil, diantaranya 2 (dua) buah merupakan joint venture dengan PERTAMINA yaitu CONOCO dan Total Indonesia.

Adapun daerah operasional dari ketujuh kontraktor tersebut adalah: CONOCO di Kepala Burung sebelah selatan; Total Indonesia daerah Muturi Dati II Manokwari; AMOSEAS di Nauka (Daerah Tingkat II Merauke); MARATHON di Bintuni (Daerah Tingkat II Manokwari); **PETROMER TREND di Kepala Burung; PHILIPS di Teluk Berau (Daerah Tingkat II Sorong/Manokwari), di Kamura (Daerah Tingkat II** Fak-Fak/Merauke); di Waipona (Daerah Tingkat II Yapen Waropen); dan SHELL di Mambramo (Daerah Tingkat II Jayapura).

3. Mining and Energy

Development activities in the sector of mining and energy have been focused on inventory and mapping of mineral and energy resources. It is realised that this sector has an important role in supporting activities in the sectors of industry, trade, cooperatives etc.

The region has been well-known for its potential mineral deposits and energy resources. However, only a small portionof these has in terms of quantity and quality, been already identified. According to studies and surveys those mineral deposits belong to A-class (strategic), B class (vital) and C-class are found almost in every district throughout the Province. See Table III-33.

Tabel / *Table III — 33*

Jenis Bahan Galian ***Kinds of minerals and quarrying***	**Lokasi** ***Location***
Aluminium	Peg Siklop sepanjang pantai Sarera, Pulau Misol/*Siklop mountain along Sarera beach, Misol island*
Arsenit	Sungai Jali (Kabupaten Paniai)/*The river Jali (Paniai District)*
Bismut/*Bismuth*	Sungai Api (Kabupaten Sorong)/*The river Api (Sorong District*
Krom/*Chrome*	Ifar, Tala Sefa, Tanah Merah/*Ifar, Tula Sefa, and Tanah Merah*
Tembaga/*Copper*	G. Ersberg, P. Senapan, Peg. Siklop/*Mt Ersberg, Senapan island Siklop mountains*
Emas/*Gold*	S. Deau, Peg. Siklop, S. Inwasi, S. Bewani, Pauwasi *The river Deau, Siklop Mountains, the river Inwasi, the river Bewani, Pauwasi.*
Pasir Besi/*Iron sand*	Serui
Timah Hitam/*Black tin*	Sungai Warsa Yoni (Kab. Manokwari)/*The river Warsa Yoni (Manokwari District)*
Mangaan/*Manganese*	Bareldav, P. Batanta (Kab. Sorong)/*Bareldav, Batanta island (Sorong District)*
Air raksa/*Quicksilver*	Javawijaya
Nikel/*Nickle*	P. Waigeo, P. Gag, Peg. Siklop/*Waigeo island, Gag island, Siklop mountains*
Platina/*Platium*	Peg. Siklop/*Siklop Mountains*
Perak/*Silver*	Peg. Siklop, Sungai Leden/*Siklop Mountains and the river Leden*
Uranium	Sungai Momi (Kab Manokwari)/*The river Momi Manokwari District)*
Seng/*Zinc*	Kwatisore (Kab Paniai)/*Kwatisore (Paniai District)*
Timah putih/*White tin*	Sungai Momi (Kab Manokwari)/*The river Momi Manokwari District)*
Tungsten/*Tungsten*	Peg. Siklop, Sungai Bon/*Siklop Mountains and the river Bon*
Fosfat/*Phosphate*	P. Ajawai (Biak), Kep. Soroan (Sorong)/ *Ajawai island (Biak), Soroan islands (Sorong)*
Asbes/*Asbestos*	Peg. Siklop (Danau Sentani)/ *Siklop Mountains (Lake-Sentani)*
Intan/*Diamond*	Pulau Batanta, Pele/*Batanta island, Pele*
Marmer/*Marble*	Ormu Kec. Depapre, Kwatisore dan Sungai Nabaruwa (Nabire)/*Ormu Depapre, Subdistrict, Kwatisore and the river Nabaruwa (Nabire)*
Mika/*Mica*	Pulau Ron/*Ron island*
Opal/*Opal*	Teluk Lilinta/*Lilinta bay*
Talk	Peg. Siklop, Pulau Misol/*Siklop Mountains, Misol island*
Batubara/*Coal*	Horna, Dusner, S. Werapasi Mambramo, P. Misol, Salawati Timur/Barat/*Horna, Dusner, the river Werapi Mambramo, Misol Island, East/West Salawati*
Batu gamping/*Limestone*	Jayapura, Biak, Manokwari, Fak-Fak, Sorong, Wamena/ *Jayapura, Biak, Manokwari, Fak-Fak, Sorong, Wamena*
Gambut/*Peat*	Mambramo, Sorong, Merauke dan Genyem/ *Mambramo, Sorong, Merauke, Genyem.*

Sumber : *Monografi Irian Jaya Tahun 1984*
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

Some of the indigenous mineral resources i.e. copper, limestone, clay and strategic oil, have been already exploited.

Activities in the sector of mining and energy conducted during Pelita III had been covering : research, survey, and exploration. Further, general research and pre-exploration on C Class quarrying materials had also been conducted, to encompass exploration of marble deposits at the river Wabarua and Kwafisora (Paniai District) and the river Armu (Jayapura District); exploration of raw material for cement the deposit of which is estimated profitable to be mined in Nafri and Adepantai; exploration of limestone deposits in Jayapura, Biak, Sorong, Fak-fak, Manokwari, Nabire, and Serui; exploration of clay deposits in Manokwari and Nabire; geological mapping over an area from the west to central part of the Province or about 55 % of the region's total area, and systematically geological mapping at a scale of 1 : 20,000 over Manokwari and Jayapura territories; mapping of environmental geology and inventory of water resources potentials in the territories of Jayapura, Merauke, and Sorong soil-water (?) drilling has been utilised in Arso, Abe pantai, Kotaraja, and Sentani), and mapping of environmental geology with a scale of 1 : 250,000

Dari ketujuh kontraktor tersebut dalam kegiatan pertambangan khususnya minyak dan gas bumi di Irian Jaya hingga akhir Pelita III didapat ada 3 (tiga) buah kontraktor yang tercatat aktif bergerak di bidang ini, yaitu Pertamina Unit V, Petromer Trend dan Philips. Sedangkan perusahaan minyak Belanda BMP, menurut data dari Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Irian Jaya tahun 1983 juga melakukan kegiatan penyaluran minyak dan gas bumi di Unit Pemasaran VIII Jayapura. Lihat Tabel III-35.

Mengenai penyaluran BMP di Unit Pemasaran VIII Jayapura ialah terdiri dari Avigas, Avtur, Premium, Minyak Tanah, dan Minyak Solar yang mencapai jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan Maret 1983 mencapai 179.920 kilo liter, dan pada Agustus 1983 tercatat menurun menjadi 68.908 kilo liter. Disamping 5 (lima) jenis minyak tersebut di atas juga terdapat Aviation Lubs, Automative Lubs dan Industrial Lubs yang pada Maret tahun 1983 mencapai jumlah 2.225 kilo liter, dan April s/d Agustus 1983 tercatat sebanyak 854 kilo liter.

over East Timika area and with a scale of 1 : 63,600 over Jayapura Sentani Area.

The major obstacles the Province is facing in managing its mineral resources have been the lack of experts and geologists especially, and inappropriate means and infrastructures of communications and transportation.

a. Metal mining

The mining of copper in Ersberg, now known as Jayapura, Irian Jaya, the only one in Indonesia, is managed by the Freeport Indonesia Incorporated.

The working-contract between the Indonesian Government and Freeport Indonesia Incorporated is mentioned under decision of Ampera Cabinet Presidium No 82/EK/Kep/1967. This working-contract is indeed the first such contract in non-oil mineral exploration. The coppermining came into operation when President Soeharto inaugurated it on March 3, 1973. At this occasion for the first time the word "Tembagapura", a new name for the town in which the Freefort is operating, was used.

Tabel / *Table III — 34*

PRODUKSI BIJI TEMBAGA DI IRIAN JAYA TAHUN 1977 S/D 1982
COPPER PRODUCTION IN IRIAN JAYA, 1977 — 1982

Pokok *Description*	Satuan *Measure*	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Biji tembaga/ *Copper ore*	ton kering DWT	2.530.464	2.694.055	3.037.905	2.988.081	3.374.138	3.432.822
Kadar CU rata-rata/*Average CU content*	%	2,41	2,28	2,06	2,10	2,22	2,60
Biji diolah/ *Processed ore*	ton kering DWT *DWT*	2.482.795	2.689.733	2.927.537	2.977.223	3.240.559	3.511.288
Konsentrat/ *Consentrate*	ton kering DWT *DWT*	189.103	180.933	188.769	186.087	188.472	223.700
Kadar CU/ *CU content*	%	30,2	32,58	31,89	31,72	53,17	34,84
Kadar Au/ *Au content*	gram/ton	9,6	9,7	9,2	9,2	7,48	9
Kadar Ag/ *Ag content*	gram/ton	120	128	122	105	126,43	144
Konsentrat dikapalkan/ *Concentrate on board*	ton kering DWT *DWT*	200.582	185.596	168.634	192.513	197.146	228.738
Nilai Ekspor/ *Export value*	AS$ *US $*	73.120.000	81.911.000	109.036.000	153.000.000	135.337.000	120.055

Sumber Data : Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Dati I Irian Jaya.
Data Source : The Regional Office of the Department of Mining and Energy of Irian Jaya.

Ini juga terjadi penurunan dalam hal pemasaran selama dua tahun Pelita III. Sehingga total BMP selama dua tahun menjadi 182.145 kilo liter pada April 1982 - Maret 1983, setahun kemudian terjadi penurunan menjadi 69.762 kilo liter.
Kemudian keadaan produksi pertambangan dan pemasaran hasil-hasil minyak bumi di daerah ini pada tahun 1983 - 1985 berkembang sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di sektor lainnya.

Minyak bumi, gas bumi, dan konsentrasi tembaga merupakan hasil pertambangan yang menonjol di daerah ini yang tidak sedikit sumbangannya terhadap pembangunan regional yaitu menempati urutan pertama (51,32%) dilihat atas dasar harga berlaku tahun 1982 - 1984. Lihat Tabel III-36.

Kelistrikan

Pembangunan kelistrikan di Propinsi Irian Jaya bertujuan mendorong kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat kota dan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan prasarana penyediaan tenaga listrik yang merata dalam jumlah yang cukup mutu, dan baik serta dengan harga yang wajar sehingga terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Fasilitas kelistrikan di Irian Jaya ditangani dengan sistem kelistrikan PLN, dan Non PLN Wilayah X. Pembangkitan hampir seluruhnya dilakukan dengan PLTD. Baru ada sebuah PLT Mikro Hydro dengan kekuatan 0,12 MW. Potensi pengembangan PLTA cukup besar yaitu didapat dari sumber tenaga air yang dapat dimanfaatkan untuk membangun 34 PLTA dengan potensi 22.108 MW.

Keadaan kelistrikan di Irian Jaya seperti **Sumber Energi Primer,** untuk pembangkit tenaga listrik yang sudah diketahui dan dimanfaatkan adalah tenaga air. Potensi minyak bumi yang dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Pertamina sepenuhnya dimanfaatkan untuk ekspor bagi sumber devisa negara. Sumber tenaga air dapat dimanfaatkan untuk membangun 34 buah PLTA mencakup potensi sebesar 22.130,8 MW. Lihat Tabel III-37.

The deposits of copper in Tembagapura is estimated at 33 million tons. One ton of copper are contains an average content of 2.5 % (?) copper, 41 % iron, 0,76 (?) gram gold, and 9 gram silver. Such deposits are also found in Mt.Bijih Timur with recoverable reserves of 37,346,000 tons having CU content equivalent to 2.34 %. See Table III-34.

b. Non-metal quarrying (C clas)

One of the many kinds of non-metal quarrying which has been already quarried is limestone. Its deposits are found at Jayapura, Biak, Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Nabire, and Serui. In general this kind of quarrying material is used by local people for making bricks. Another quarrying material, clay, the deposits of which are found at Manokwari and Nabire, has been also utilised by the local people for making red bricks.

c. Strategic mining (A class)

Among the strategic mineral resources found in this region only oil has already been exploited.

Besides the State-owned oil company Pertamina, 7 foreign oil companies acting as contractors to Pertamina have operated here. Those contractors, two of which are Pertamina's joint - venture companies namely CONOCO and Total Indonesia, operated under a production sharing contract. The CONOCO has its oil field at the southern part of Kepala Burung, Total Indonesia at Maturi (Manokwari District), AMOSEAS at Nouka (Merauke District), MARATHON at Bintuni (Manokwari District), PETROMER TREND at Kepala Burung, Philips at Beran Bay (Sorong/Manokwari District), Kemura (Fak-Fak/Merauke District), Waipona (Yapen Waropen District), and SHELL at Mambramo (Jayapura District).

Up to the end of Pelita III, only 3 contractors were still active, namely Pertamina (Unit V), Petromer Trend, and Philips. In addition, according to the 1983 records available at the Regional Office of the Department of Mining and Energy of Irian Jaya Province, the Dutch oil company BPM had been enganging in distributing oil and natural gas at the VIIIth unit marketing area of Jayapura. See Table III-35.

The Dutch Oil Company BMP distributed Avigas, Avtur, Premium,

Tabel / *Tabel III — 35*

PRODUKSI MINYAK GAS BUMI OLEH PERUSAHAAN DI PROPINSI
TAHUN 1979 - 1982
OIL AND GAS PRODUCTIONS BY COMPANY IN IRIAN JAYA,
1979 — 1982

Nama Perusahaan *Name of Companies*	1979	1980	1981	1982	Keterangan *Remarks*
PERTAMINA UNIT V					
a. Minyak mentah/barel/ *Crude oil (barrel)*	477.740	641.216	603.944	503.376 *)	*) Januari s/d Oktober 1982
b. Gas/Mcf	-	-	-	-	-sda-
PETROMER TREND					
a. Minyak mentah/barel/ *Crude oil (barrel)*	22.662.484	19.869.070	16.111.233	13.245.267 *)	-sda-
b. Gas/Mcf	1.019.948	917.335	766.310	990.367 *)	-sda-
PHILIPS					
a. Minyak mentah/barel/ *Crude oil (barrel)*	3.105.107	2.188.065	1.568.560	1.046.906 *)	-sda-
b. Gas/Mcf	368.638	1.414.501	2.437.914	2.423.051 *)	-sda-

Sumber data : Kanwil Departemen Pertambangan dan energi Propinsi Dati I Irian Jaya
Source : The Regional Office of the Department of Mining and Energy of Irian Jaya Province.

Tabel / *Table III — 36*

PRODUKSI PERTAMBANGAN DI IRIAN JAYA MENURUT JENIS BARANG
DI IRIAN JAYA TAHUN 1983 - 1985
MINING PRODUCTION BY KINDS OF MINERALS, IN IRIAN JAYA, 1983 — 1985

No	Jenis Barang *Kinds of mineral*	Lokasi *Location*	Satuan *Measures*	1983	1984	1985
1.	Minyak Bumi/ Oil	Klamono, Sele dan P. Salawati	Barel *barrel*	15.618.273	14.320.178	12.560.539
2.	Gas Bumi/Gas	-sda-/Idem	Mcf	6.441.218	5.670.986	7.216.788
3.	Konsentrat tembaga/ *Copper Concentrate*	Tembaga pura	Dmt	160.317	190.349	232.599

Sumber : Kanwil Dep Pertambangan dan Energi Propinsi Dati I Irian Jaya
Source : The Regional Office of the Department of Mining and Energy of Irian Jaya Province.

Karena beban PLN yang masih relatif rendah, dan letaknya jauh maka potensi ini baru dimanfaatkan 0,12 MW di Wamena sebagai PLTA Mikro. Dalam Pelita IV dan V yang akan datang sumber tenaga air yang direncanakan akan dibangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Sentani (12 MW) sekitar 15 Km dari Jayapura.

Fasilitas pembangkit listik yang dikelola PLN dalam akhir tahun anggaran 1983/1984 tercatat sebesar 28,33 MW kapasitas terpasang yang tersebar padsa 22 pusat pembangkit listrik untuk melayani 22 pusat beban. Masing-masing pusat listrik berdiri sendiri (belum interkoneksi), hal ini disebabkan daerah pusat beban yang berjauhan disamping faktor alam yang masih sulit dijangkau. Dari 22 pusat pembangkit listrik, 10 diantaranya beroperasi 24 jam sehari, 11 beroperasi 6 jam sehari dan 1 beroperasi 12 jam sehari. Penyebab beberapa lokasi pusat beban belum dapat beroperasi 24 jam sehari adalah beban yang relatif sangat rendah terutama pada siang hari kesulitan supply bahan bakar minyak HSD secara teratur dan terbatasnya kapasitas mesin pembangkit. Lihat Tabel III-38 dan III-39.

Pengembangan sistem pembangkitan di PLN Wilayah X dilakukan dengan cara pengembangan sistem terpisah. Antara lain oleh karena jauhnya lokasi masing-msing sistem dan beban yang relatif masih rendah.

Dengan tersedianya sumber tenaga air yang siap pakai, maka alternatif pengembangan masing-masing sistem pembangkitan dilakukan dengan Pengembangan Hidro.

Pemilihan pengembangan hidro untuk sistem Jayapura dan sistem Wamena menghasilkan rencana pembangunan PLTA di danau Sentani dekat Jayapura dan di sungai Wamena dan diharapkan mulai beroperasi dalam masa Repelita IV. PLTA Sentani I sudah dilakukan feasibility study oleh Acres pada tahun 1983, dan PLTA Wamena II sudah diselidiki oleh regu survey Proyek Induk Sarana Fisik PLN tahun 1981 yang lalu dan rencana dibangun PLTM sebesar 0,24 MW tahun 1984/1985 diharapkan selesai tahun 1985/1986, pengembangan sistem dengan alternatif pengembangan Thermal menghasilkan rencana pembangunan PLTD sebesar 44,99 MW pada 17 lokasi.

Kerosene, and solar, which altogether amounted to 170,920 kilolitres in March 1983 and 68,908 kilolitres in August 1983. In addition to the fuels mentioned above there the also Aviation Lubs, Automotive Lubs and Industrial Lubs the distribution of which reached 2,225 kilolitres between April to August 1983.

The marketing of fuel underwent a decrease during the first two years of Pelita III. The total sales of BMP reached 182, 145 kilolitres in the period of April 1982 to March 1983, and declined to 69,762 kilolitres in the following year.

Oil, gas and copper have been the region's chief mining products, and based on the current price between 1982 and 1984 they altogether accounted for 51.82 % of the region's total development expenditures, surpassing the contribution of other sectors. See Table III-36.

d. Electricity

The development of electricity in this region is directed towards the encouragement of social and economic activities in order to ameliorate the people's welfare. In this context, it is necessary that electric supply be evenly distributed with a price the people can afford.

Most of the region's electric supply is produced by power diesel electric plants, and the rest by micro hydro-electric stations. The Regional X of the State-owned Electric Company (PLN) is responsible for the management of electricity of the region. See Table III-37.

Further, a hydro power electric station with a capacity of 12 MW is to be built in Sentani, some 15 kilometres away from Jayapura.

Up to the end of fiscal year 1983/1984 the total installed capacity of the 22 power diesel electric plants owned by PLN had been 28.33 Megawatts.

Because of very long distances from one plant to another and of other unfavourable natural factors there has been no interconnection transmission among those power diesel electric plants. In the meantime, of the 22 power diesel electric plants 10 are operating for 24 hours a day, 11 for 6 hours, and 1 for 12 hours. The incontinuous operation of the 12 plants was primarily due to irregular supply of HSD fuel and limited capacity of generators. See Tables III-38 and III-39.

With an abundance of water resources available here, hydro electric power stations have been and will be continuously developed. In relation with this,

Tabel / *Table III — 37*

POTENSI TENAGA AIR DI SUNGAI—SUNGAI DI IRIAN JAYA
HYDRO POWER POTENTIAL BY RIVERS IN IRIAN JAYA

Basin No.	River Basin *Name of River*	Kabupaten *District*	Potential *Potential*	
			Potential Max (MW) *Maximum potential*	Energy (Gwh) *Energy potential*
5.	S. Digul	Merauke	1.521.7	10.522.0
6.	Eilandu	Merauke	2.291.1	16.251.9
7.	Noordwest	Merauke	232.2	1.554.2
8.	Blumen	Merauke	273.2	1.870.2
9.	Cemara	Merauke	237.4	1.778.1
10.	Otokwa	Fak-Fak	296.7	2.160.4
11.	Aikwa	Fak-Fak	105.9	743.7
12.	Mimika	Fak-Fak	153.7	1.134.7
13.	Tunga	Fak-Fak	1.614.6	11.999.0
14.	Omba	Fak-Fak	235.4	1.541.3
17.	Lengguru	Fak-Fak	165.7	1.164.1
18.	Naomi	Fak-Fak	6.3	59.6
20.	Mareder	Fak-Fak	10.2	65.0
24.	Aramasa	Fak-Fak	51.9	238.7
26.	Muturi	Manokwari	88.1	499.0
27.	Tembuni	Manokwari	142.8	884.0
28.	Sebjar	Manokwari	458.0	2.680.8
29.	Aiman	Manokwari	309.3	1.715.0
30.	Kemundan	Manokwari	461.8	2.328.0
31.	Amaru	Sorong	11.1	49.3
32.	Kloduk	Sorong	279.8	1.442.0
34.	Mega	Sorong	29.7	154.2
35.	Koor	Sorong	245.7	1.498.7
36.	Kasi	Manokwari	593.2	3.779.0
37.	Pafi	Manokwari	285.7	1.530.7
39.	Wosuni	Manokwari	15.0	116.7
41.	Wanggar	Paniai	77.7	492.2
42.	Siriwo	Paniai	310.2	2.206.5
43.	Warenai	Yapen Waropen	1.583.3	10.109.4
44.	Rambak	Yapen Waropen	33.5	172.1
45.	Nadubuai	Yapen Waropen	19.3	94.1
46.	Mamberamo	Jayapura & Jayawijaya	9.931.9	53.883.4
50.	Wiru	Jayapura	25.0	148.2
51.	Tami	Jayapura	34.5	171.6

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya, Tahun 1984.
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

Beban pada umumnya berada di sekitar pusat pembangkit, maka belum digunakan sistem penyaluran daya dengan jaringan transmisi. Pembangunan PLTA Sentani I dan Sentani II dengan kapasitas daya terpasang seluruhnya 12 MW dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan jaringan transmisi 70 KV masing-masing ke Jayapura dan Sentani sepanjang 16 Km dan 10 Km.
Oleh karena itu mulai tahun 1988/1989 sistem Wamena sudah diinterkoneksikan dengan sistem Jayapura sehingga Wamena tidak lagi ada rencana tambahan pembangkit sampai akhir Pelita V.

Sistem distribusi menggunakan tegangan menengah 6 KV dan 20 KV disisi primer, dimana mulai sekarang sistem distribusi tegangan 6 KV tidak dikembangkan lagi dan secara bertahap akan diganti dengan sistem distribusi tegangan 20 KV sudah ada yang dioperasikan dan konstruksi 20 KV siap operasi. Pada sisi sekunder menggunakan sistem dengan tegangan 220/380 Volt. Pada akhir tahun anggaran 1983/1984 fasilitas ini melayani 20.856 konsumen di seluruh PLN Wilayah X Irian Jaya. (Lihat Tabel III-40).

Dengan menambah kemampuan pembangkit sebesar 45,23 MW 26 Km jaringan transmisi 70 KV dan 26 MVA kapasitas distribusi, maka jumlah konsumen akhir tahun 1983/1984 sebesar 20.856 konsumen diperkirakan akan meningkat menjadi 72.738 konsumen pada akhir Pelita IV.
Fasilitas distribusi terpasang yang dibutuhkan mencapai jumlah 57 Km Jaringan Tegangan Menengah (JTM), 167 Km Jaringan Rendah (JTR) dan 10 KVA kapasitas Tegangan Menengah (JTM), 167 Km Jaringan Rendah (JTR) dan 10 KVA kapasitas travo distribusi.

Listrik Pedesaan

Program listrik pedesaan di Propinsi Irian Jaya dimulai sejak tahun anggaran 1977/1978. Sampai akhir Pelita III telah dilistriki 22 desa dengan 1.818 langganan. Untuk menunjang keberhasilan listrik masuk desa kepada masyarakat telah diberikan kemudahan untuk memperoleh sambungan listrik dengan diadakan kerjasama PLN-BRI dalam

Tabel / *Table III — 38*

KOMPOSISI KAPASITAS TERPASANG PLN WILAYAH X IRIAN JAYA TAHUN 1984
ELECTRIC INSTALLED CAPACITY PRODUCED BY PLN IRIAN JAYA IN 1984

Pusat Listrik *Power stations*	Unit *Unit*	MW *MW*	% *Percentage*
PLT Diesel/ *Diesel electric power plant*	88	28,21	99
PLT Mikrohidro/ *Micro hydro-electric power station*	1	0,12	1
Jumlah / *Total*	89	28,33	100

Sumber : PLN Wilayah X Irian Jaya
Source : State-Owned Electric Company Region X Irian Jaya.

Tabel / *Table III — 39*

DAYA PEMBANGKIT DI PLN WILAYAH X AKHIR TAHUN 1983/1984
ELECTRIC GENERATING CAPACITY IN PLN REGION X AT THE END OF FISCAL YEAR 1983/1984

No	Lokasi *Location*	Jenis Pembangkit *Kind of generator*	Jumlah Unit *Number of units*	Daya Terpasang (KW) *Installed capacity*
1.	Javapura	Diesel	7	8.296
2.	Sentani	Diesel	6	1.301
3.	Genyem	Diesel	2	80
4.	Sarmi	Diesel	2	150
5.	Dosay	Diesel	1	40
6.	Wamena	Diesel	1	160
		Microhidro	1	120
7.	Biak	Diesel	11	5.480
8.	Serui	Diesel	6	541
9.	Nabire	Diesel	4	555
10.	Manokwari	Diesel	9	2.176
11.	Bosnik	Diesel	1	40
12.	Sorong	Diesel	9	5.558
13	Doom	Diesel	3	300
14.	Fak-Fak	Diesel	6	1.101
15.	Kaimana	Diesel	2	100
16.	Merauke	Diesel	7	1.816
17.	Tanah Merah	Diesel	3	90
18.	Kuprik	Diesel	1	100
19.	Danawetria	Diesel	1	100
20.	Teminabuan	Diesel	2	80
21.	Bade	Diesel	2	60
22.	Kuprik	Diesel	2	80
	Jumlah /Total		89	28 334

Sumber : PLN Wilayah X Irian Jaya
Source : State-Owned Electric Enterprises Region X Irian Jaya.

hydro-electric power stations are to be built at Sentani Lake nearby Jayapura and at the river Wamena the planning of them have been already completed. It is expected that those two stations will have started their operations within the period of Pelita IV.

A feasibility study of Sentani hydro-electric power station was conducted by Acres in 1983. In the meantime field studies over the site of Wamena II hydro-electric power station project were carried out by a survey team from Central Project for State-owned Electric Enterprises' Physical Facilities in 1981.

The construction of Wamena II hydro electric power station was started in fiscal year 1984/1985 and scheduled to be completed in fiscal year 1985/1986. In addition, diesel electric power plants with a total capacity of 44.99 MW are scheduled to be installed at 17 locations.

The construction of Sentani I & II hydro-electric power stations will be followed by the development of the 70 KV-transmission network of 16 kilometres from the location to Jayapura and 10 kilometres to Sentani town.

Furthermore, starting fiscal year 1988/1989 and interconnecting transmission linking Jayapura and Wamena will have been in operation. Therefore, up to the end of Pelita V there will be no establishment of electric power stations.

Formerly the primary distribution system used the 6 KV middle tension, but since recently the 20 KV has been gradually replacing the previous one while the secondary distribution system has been using the 220/380 volt tension. At the end of fiscal year 1983/1984 PLN Region X Irian Jaya served 20,856 consumers. *See Table III-40.*

Tabel / *Table III — 40*

JUMLAH LANGGANAN, KVA TERSAMBUNG DAN KWH TERJUAL TAHUN 1977/1978 - 1983/1984
NUMBER OF CONSUMERS, KVA CONNECTED, AND KWH SOLD, 1977/1978 - 1983/1984

Hal *Items*	Tahun *Year*	Kategory of tariff *Category of tariff*				
		Rumah tangga *Household*	Komersil *Commercial*	Industri *Industry*	Umum *Public*	Jumlah *Total*
1.Jumlah Pelanggan/ *Number of Consumers*	1977/1978	7.290	1.857	21	415	9.583
	1978/1979	8.009	2.185	25	435	10.654
	1979/1980	9.532	2.447	33	493	12.505
	1980/1981	11.087	2.610	94	535	14.326
	1981/1982	12.237	2.872	107	611	15.827
	1982/1983	14.463	3.096	107	684	18.350
	1983/1984	16.703	3.316	18	819	20.856
2. KVA tersambung/ *KVA connected*	1977/1978	12.166.870	9.463.970	2.456.600	1.722.570	25.810.010
	1978/1979	13.001.600	10.150.700	2.853.200	1.791.990	27.797.100
	1979/1980	14.123.330	10.148.880	3.901.400	1.908.900	30.082.510
	1980/1981	14.486.000	11.992.710	3.528.350	2.331.760	32.338.820
	1981/1982	14.670.600	12.337.850	4.584.600	2.421.470	34.014.520
	1982/1983	16.283.250	13.415.300	4.059.700	2.752.060	36.510.310
	1983/1984	19.713.750	14.450.800	784.500	3.389.840	33.339.890
3. KWH terjual/ *KWh sold*	1977/1978	12.750.558	8.828.407	2.741.955	2.192.255	26.513.175
	1978/1979	14.904.782	10.253.676	3.244.280	2.536.950	30.939.688
	1979/1980	16.570.018	11.295.565	3.608.677	2.522.585	33.996.845
	1980/1981	19.465.619	13.358.189	4.092.223	3.615.688	40.531.719
	1981/1982	21.032.156	14.771.368	4.812.670	3.489.076	44.105.270
	1982/1983	23.284.255	15.357.496	5.737.203	3.892.494	48.271.448
	1983/1984	27.320.948	15.575.833	819.792	4.541.987	48.258.560

Sumber : PLN Wilayah X Irian Jaya.
Source : PLN Region X Irian Jaya.

pemberian kredit listrik pedesaan kepada para calon langganan. Disamping itu juga telah ditandatangani kerjasama Penelitian antara PLN-UNCEN untuk mengadakan studi kelayakan pada 42 desa di Irian Jaya, untuk mengembangkan listrik pedesaan selanjutnya.

Program listrik masuk desa dalam Pelita IV diharapkan dapat melistriki 40 desa dengan 4.000 konsumen.
Desa-desa yang mendapat prioritas pembangunan listrik desa adalah desa Swasembada termasuk ibukota Kecamatan yang letaknya dekat dengan jaringan listrik yang telah ada atau dengan membangun PLTD Perintis.

4. Perhubungan

a. Perhubungan Darat

Berdasar laporan Team FUNDWI (1968) panjang jalan yang dibangun Pemerintah Belanda di Propinsi Irian Jaya sekitar 800 Km, yang sebagian besar dalam keadaan rusak karena tidak ada pemeliharaan sejak tahun 1962. Lebar jalan bervariasi antara 6-8 m, beraspal dan cukup untuk dilalui truk atau bus. Jalan-jalan ini ada di daerah pantai tetapi tidak menghubungkan ibukota Kabupaten. Keadaan daerah pedalaman yang bergunung dan hutan lebat menyebabkan sukarnya membangun jalan atau dapat dengan biaya tinggi.

Jalan dan jembatan

Dalam periode Pelita I di Irian Jaya tidak dilakukan pembangunan jalan baru, dan kegiatan di bidang ini hanya merehabilitasi jalan terbatas pada jalan yang masih bisa dilalui dan mempunyai prospek sosial ekonomi yang baik. Rusaknya jalan dan menurunnya angkutan darat menyebabkan kesukaran dalam kegiatan angkutan penumpang dalam kota. Sebelum Pelita II panjang jalan yang dapat dilalui sekitar 160 Km. Keadaan ini pula menyebabkan peranan angkutan darat sangat kecil dalam kegiatan Pemerintahan maupun perekonomian di daerah ini. Secara keseluruhan hubungan jalan raya antara kabupaten dapat dicapai bila jalan Trans Irian selesai dibangun. Apabila tidak dilakukan pembangunan jalan maka daerah ini tidak akan berkembang. Mengingat hal tersebut maka pembangunan jalan di Propinsi Irian Jaya didasarkan pada pertimbangan : (1) Mencegah isolasi daerah pedalaman maupun daerah terpencil; (2) Meningkatkan kegiatan sosial ekonomi dengan menyediakan angkutan yang lebih murah; (3) Menunjang kegiatan di sektor-sektor lain, seperti transmigrasi, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan sektor-sektor pelayanan sosial masyarakat; (4) Menunjang kegiatan pemerintah dan (5) Menunjang kegiatan bidang Hankam.

Pembangunan jalan dan jembatan di Irian Jaya dilaksanakan melalui berbagai proyek seperti : jalan Trans Irian, proyek pembangunan jalan

The number of consumers at the end of Pelita IV is estimated at 72,738 as the generating capacity will increase by 45.23 MW, transmission networks of 70 KV by 26 kilometres, and distribution capacity by 26 KVA.

What the region needs now are middle-tension transmission networks of 75 kilometres, low-tension of 167 kilometres, middle tension transmission networks of 10 KVA, low-tension transmission networks of 167 kilometres, and distribution transformers with a capacity of 10 KVA.

Rural Electricity

The rural electricity programme in this region began in fiscal year 1977/1978. Up to the end of Pelita III there had been 22 villages enjoying the programme, with 1,818 consumers.

In the meantime, to make the rural electricity programme successful, the would-be consumers are given bank loans by Bank Rakyat Indonesia to have electricity connections. Further, an agreement was signed by both PLN and UNCEN to conduct feasibility studies on electricity development in 42 villages in Irian Jaya.

It is expected that during Pelita IV 40 villages with 4,000 consumers will have enjoyed electricity. Of those villages the developed villages and sub-district capital towns nearby the distribution networks or power stations are given first priority.

4. Communication

a. Inland Communication

According to reports by a FUNDWI team in 1968 the total extent of roads built by the Dutch Government during its occupation was about 800 kilometres, the greater part of which is now in rather bad condition. Those asphalted roads ranges between 6 to 8 metres wide and they are passable by trucks or buses. Most of those roads are found at coastal areas but they are not connecting one district capital town with the other.

Roads and bridges

There has been no new road construction in this region during Pelita I, while rehabilitation works had been limited to still passable roads and the ones having good social and economic porspects. Before Pelita II the extent of passable roads had been about 160 kilometres. This condition had indeed effected and discouraged administrative and economic activities in the region.

The development of roads in this region is designed to :

1. *open remote and isolated areas,*
2. *stimulate social and economic activities,*
3. *support other activities such as transmigration, plantation, mining, forestry as well as the community's social activities,*

Inpres Dati I, jalan Inpres Dati II, proyek padat karya, proyek penyiapan lahan transmigrasi. Disamping itu ada juga pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh perusahaan kayu pemilik HPH (jalan Log), jalan yang dibangun perusahaan pertambangan seperti Freeport dan perusahaan minyak. Jalan yang dibangun dengan dana Pemerintah terdiri dari jalan negara, jalan Propinsi dan jalan kabupaten dengan berbagai jenis konstruksi (jalan aspal, jalan perkerasan dan jalan tanah). Sedangkan jalan log dibangun oleh perusahaan pemegang HPH ada di Kabupaten Fak-Fak, Jayapura, Paniai dan Yapen Waropen sekitar 600 Km.

Pembangunan jembatan merupakan suatu masalah dalam peningkatan lalulintas darat di Irian Jaya, ini disebabkan banyaknya sungai yang harus dipotong oleh jalan. Di daerah pedalaman keadaan ini lebih berat karena bahan berupa besi atau semen harus didatangkan dari daerah pantai menggunakan angkutan udara, yang membuat biaya menjadi tinggi. Secara tradisional masyarakat pedalaman membuat jembatan gantung dari kayu dan rotan untuk alat penyeberangan sungai-sungai.

Jembatan-jembatan di kota biasanya dibuat dengan konstruksi beton sedangkan di luar kota dibuat dengan konstruksi baja berupa baja aerow atau calender hamilton atau jembatan kayu. Jumlah jembatan di Irian Jaya sampai tahun 1983 ada sekitar 527 buah yang panjang seluruhnya sekitar 6 - 265 m. Lihat Tabel III-41.

Perhubungan dengan kondisi physik serta penyebaran penduduk yang tipis dan tidak merata mengakibatkan pembangunan prasarana perhubungan darat tidak selancar seperti halnya perhubungan udara dan laut. Liuk-liuk dan ruas jalan masih terbatas di wilayah ibukota Kabupaten dan belum ada suatu liuk yang dapat menghubungkan antar ibukota Kabupaten. Jenis angkutan yang berperan dalam perhubungan darat di Irian Jaya meliputi : angkutan jalan raya, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Irian Jaya yang masih mengadakan transportasi air sungai selama Pelita III mencapai arus penumpang sebanyak 5,5 juta penumpang, dan barang 43.401/ton. Kenaikan rata-rata arus penumpang air antara 18,2% - 20% dan barang 1,6%.

Sementara itu di Irian Jaya pada tahun 1985 terdapat 7244 mobil penumpang, Bus 443, gerobak 3.520, kendaraan sepeda motor 24.633 buah. Lihat Tabel III-42 dan III-43.

b. Perhubungan Laut

Selama Pelita III kegiatan Pelayanan Nusantara dilakukan oleh PT Pelni, PT Sriwijaya Lines, PT Abadi Inti Lines, PT Siantan dan PT Delimaju. Sedangkan Perusahaan Pelayaran yang mempunyai Kantor Cabang di daerah ini ialah PT Pelni dan PT Sriwijaya Lines.
Pelayaran Samudera yang sifatnya transfer ke Irian Jaya dengan negara Jepang, Korea, Hongkong, Philipina, Thailand mengangkut barang-barang General Cargo, Bahan Pokok dan barang strategis lainnya. Kegiatan bongkar muat selama lima tahun (1979 s/d 1983) umumnya lebih besar kegiatan bongkar. Kegiatan muat yang tercatat tahun 1982 hanya 50 ton sedangkan bongkar 49.651 ton. Lihat Tabel III-44 dan III-45.

Adapun kegiatan Pelayaran Khusus ialah termasuk Pelayaran Khusus Ikan/Udang; dan Pelayaran Khusus lepas pantai.

Kegiatan Perusahaan Pelayaran Lokal di Irian Jaya dalam tahun 1983 yaitu 5 perusahaan pelayaran dengan jumlah armada 27 unit kapal dan tonage sebanyak 2.209 DWT. Kelima perusahaan tersebut adalah: PT Tembagapura Shipping dengan Kantor Pusat di Biak; PT Prima Mamberamo Shipping dengan Kantor Pusat di Jayapura; PT Coral Mas dengan Kantor Pusat di Sorong; PT Telaga Rahmat Jaya dengan Kantor Pusat di Sorong; dan PT Kalimaro Kantor Pusatnya di Merauke. Lihat Tabel III-46.

Pada tahun 1983 mulai kelihatan adanya animo dari masyarakat untuk mengusahakan bidang pelayaran rakyat. Hal ini dilihat dengan adanya beberapa Perusahaan Rakyat yaitu : CV Pautan, CV Usaha Bhakti, CV Cahaya Rahmat Sorong, CV Usaha Pangkep, CV Cendrawasih Jaya, kesemuanya berdomisili di Jayapura, CV Biak Jaya di Biak; CV Teluk Mandar di Sorong; dan CV Samudera Raya di Fak-Fak. Jumlah armada yang dimiliki sebanyak 14 unit perahu motor dan yang diageni oleh 65 unit perahu motor dengan jumlah tonage 913 M3.

Untuk menunjang kegiatan pelayaran PT Pelni mulai tahun 1980 Pelayaran Perintis di Irian Jaya. Jumlah Call pada tahun 1980 sebanyak 453 dan tahun berikutnya 614 serta tahun 1982 sudah mencapai 645.

Untuk menunjang kegiatan sub sektor perhubungan laut di Irian Jaya tersedia sarana bantu Navigasi yang tersebar di 6 Kabupaten, yaitu: Kabupaten Jayapura memiliki 1 buah menara suar, 2 buah rambu suar gas, 2 buah rambu suar, 1 buah pelampung suar, 3 buah anak pelampung dan 5 buah rambu-rambu.

4. promote governmental activities, and
5. support activities in the field of security and defence.

The development of roads and bridges in the region has been implemented to cover various development projects, such as Trans-Irian Jaya roads, road construction under Inpres Dati I and Dati II schemes, road development under Intensive Labour Project scheme, and roads under transmigration area preparation project scheme.

The development of roads and bridges has been also carded out by companies holding forest exploration rights (HPH) to transport logs, and by Freeport Indonesian Copper Ltd. as well as by oil companies operating in this region. The total extent of roads built by companies holding HPH is 600 kilometres, situated in Fak-Fak, Jayapura, Paniai, and Yapen Waropen. In the meantime the Government is responsibli for the construction and maintenance of the state, provincial and district roads and bridges.

One of the many problems in constructing roads in this region is the construction of the many bridges over so many rivers found here. Whereas the operating expenses of the construction of a bridge in the hinterland will be very expensive as the material like iron and cement have to be transported by aircraft, the only means of available transportation.

In terms of types, bridges built in towns are usually that of concrete, while in the outskirts they are of steel construction or Calender Hamilton type and even wooden bridges. In the hinterland the people make suspension bridges, using wood or rattan as the principal material. Up to 1983 the number of main bridges throughout the region had been about 527 of approximately 6,265 metres. See Table III-41.

Tabel / ***Table III — 41***

PANJANG JALAN RAYA, PANJANG JALAN DI PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 1985
EXTENT OF ROADS BY TYPE OF SURFACE IN IRIAN JAYA IN 1985

No.	Perincian *Description*	Tingkat Pemerintah Yang Berwenang *Level of government responsible*		Jumlah *Total*
		Propinsi *Province*	Kabupaten *District*	
1	2	3	4	5
I.	JENIS PEMUKIMAN/ *Type of roads Roads condition*			
	1. Diaspal *Asphalted*	291,80	709,71	1.001,51
	2. Kerikel perkerasan *Gravel*	174,00	2.515,60	2.689,60
	3. Tanah *Earth*	176,08	2.309,53	2.485,53
	4. Tidak terperinci *Unspecified*	0,00	0,00	0,00
	Jumlah / *Total*	641,80	5.534,84	6.176,64
II.	KONDISI JALAN / ***Roads condition***			
	1. Baik *Fairly good*	641,80	65,00	706,80
	2. Sedang *Moderate*	0,00	5,451,84	5.451,84
	3. Rusak *Bad*	0,00	17,00	17.00
	4. Rusak berat *Very bad*	0,00	0,00	0,00
	5. Tidak terperinci *Unspecified*	0,00	1,00	1,00
	Jumlah / *Total*	641,80	5.584,84	6.176,64
III.	KELAS JALAN / *Class of roads*			
	1. Kelas I/*Class I*	0,00	0,00	0,00
	2. Kelas II/*Class II*	398,00	0,00	398,00
	3. Kelas III/*Class III*	243,80	5.534,84	5.778,64
	4. Kelas IV/*Class IV*	0,00	0,00	0,00
	5. Kelas/*Class*	0,00	0,00	0,00
	6. Tidak terperinci/*Unspecified*	0,00	0,00	0,00
	Jumlah / *Total*	641,80	5.534,84	6.176,64

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Irian Jaya/Bagian BINAMARGA.
Source : Public Works Service of Provincial Office of Irian Jaya/Road and Bridge Division.

Unfavourable topography, sparsely and unevenly populated areas have been some of many hampering factors in constructing roads and bridges in the region. Therefore, most of the roads of the region is found in towns and their surrounding areas. This condition makes river transportation still play a dominant portion of inland transportation of the region, which during Pelita III it transported about 5.5 million passangers and 48,401 tons of freight. The average increase of river transportation during the same period was 18.2 % for passangers and 1.6 % for freight transport per annum.

Di Kabupaten Biak memiliki 9 buah rambu suar gas, 3 buah rambu suar listrik, 1 buah pelampung suar dan 5 buah anak pelampung. Kabupaten Manokwari memiliki 1 buah menara suar, 3 buah rambu suar gas, 3 buah rambu suar listirk, dan 3 buah anak pelampung. Di Kabupaten Sorong memiliki 1 menara suar, 14 buah rambu suar gas, 2 buah rambu suar listrik, 7 buah pelampung suar dan 4 buah anak pelampung. Di Kabupaten Merauke memiliki 3 buah rambu suar gas, 1 buah lampu PLBN, dan 2 buah pelambung suar. Sedangkan di Kabupaten Fak-Fak memiliki 2 buah rambu suar gas, 2 buah rambu suar listrik, 2 buah lampu PLBN dan 2 buah anak pelampung serta 1 buah rambu-rambu. Sarana bantu Navigasi ini belum termasuk yang tidak lagi berfungsi.

In 1985, there were 7.244 passanger cars 443 buses 8,520 trucks and 24,633 motorcycles in Irian Jaya Province. See Tables III-42 and III-43.

b. Sea transport

During Pelita III there were several national shipping companies operating in this region. They were state-owned shipping enterprises PELNI, Sriwijaya Lines, Abadi Inti Lines, Siantan Lines, and Delimaju Lines of which only PELNI and Sriwijaya Lines had branch offices stationed in this region. Ocean liners are transporting general canges and other strategic materials from Irian Jaya to Japan, Korea, Hong Kong, the Philippines and Thailand.

During 1979 - 1983 there have been more activities in loading of 49,651 tons of cargo compared to 50 tons of loading. See Tables III-44 and III-45.

Tabel / *Table III — 42*

ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KANTOR WILAYAH XVI IRIAN JAYA SELAMA PELITA III
RIVER, LAKE AND FERRY PASSANGER AND FREIGHT TRAFFIC IN IRIAN JAYA DURING PELITA III

No	Tahun *Year*	Trip *Trips*	Prosentase/*Percentage*		Penumpang *Passangers*	Prosentase/*Percentage*		Barang (ton) *Freight (tons)*	Prosentase/*Percentage*	
			Naik *Increase*	Naik *Increase*		Naik *Increase*	Naik *Increase*		Naik *Increase*	Naik *Increase*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1979	220.262	-	-	977.246	-	-	4.480,1	-	-
2.	1980	207.373	-	5,3	1.155.621	18,2	-	10.467,9	150,4	-
3.	1981	266.455	28,4	-	1.385.325	19,8	-	10,294,2	-	1,6
4.	1982	312.617	17,3	-	1.550.981	11,9	-	14.342,2	39,3	-
5.	1983 *)	93.215	12,6	-	505.109	16,9	-	4.116,8	94,6	-
	Jumlah/- *Total*	1.099.922	-	-	5.574.282	-	-	43.401,2	-	-

Keterangan : Jenis barang yang diangkut terdiri dari : 9 bahan pokok, bahan-bahan stategis, produksi pertanian pangan, hasil hutan, perkebunan dll.
Remarks : Freight consists of main food-stuffs, strategic materiel, horticultural products, forest products, plantation products etc.
*Catatan *) : Kegiatan baru sampai bulan Juli*
Note : Figures show records until July
Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984.
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

Tabel / ***Table III — 43***

JUMLAH JENIS KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI IRIAN JAYA MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985
NUMBER OF VEHICLES BY TYPE IN IRIAN JAYA PROVINCE IN 1985

No	Kabupaten *District*	Jenis Kendaraan *Type of vehicles*				Jumlah *Total*
		Mobil Penumpang *Passenger cars*	Mobil Bis *Buses*	Mobil Gerobak *Trucks*	Sepeda Motor *Motorcycles*	
1.	Merauke	374	18	340	2.426	3.158
2.	Jayawijaya	20	3	38	382	443
3.	Jayapura	4.467	328	1.625	9.429	15.849
4.	Paniai	113	-	125	1.341	1.579
5.	Fak-Fak	31	2	29	462	524
6.	Sorong	922	18	527	3.195	4.662
7.	Manokwari	587	38	300	1.825	2.750
8.	Yapen Waroper	89	-	48	560	697
9.	Biak Numfor	641	36	488	5.013	6.178
	Irian Jaya	7.244	443	3.520	24.633	35.840
	1984	6.975	438	3.178	22.160	32.751
	1983	6.977	279	2.571	20.870	30.697
	1982	5.005	258	2.395	13.078	21.236
	1981	4.902	254	2.157	13.078	21.091

Sumber : Kanwil XVI Dirjen Propinsi Irian Jaya Bidang LLAJR.
Source : Regional Office of the Directorate General for Highway Traffic.

Tabel / ***Table III — 44***

KEGIATAN PELAYARAN SAMUDRA UMUM DI IRIAN JAYA TAHUN 1979 S/D 1983
ACTIVITIES OF OCEAN LINERS IN IRIAN JAYA DURING THE PERIOD 1979 TO 1983

Uraian *Description*	1979	1980	1981	1982	1983
Banyak kapal yang singgah *Number of ships anchoring*	19	17	35	31	18
Bobot mati/*DWT*	121.723	147.239	219.993	155.643	91.139
Bongkar/*Unloading*	30.902	62.274	69.192	49.651	24.033
Muat/*Loading*	—	—	—	50	139

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984
Note : Data of 1983 up to June.
Catatan : Tahun 1983 data sementara sampai dengan bulan Juni.
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

Tabel / ***Table III — 45***

KEGIATAN PERHUBUNGAN LAUT DI DAERAH IRIAN JAYA TAHUN 1979 S/D 1983
ACTIVITIES OF SEA TRANSPORT IN IRIAN JAYA DURING THE PERIOD 1979 TO 1983

Uraian *Description*	1979	1980	1981		1983
Jumlah persinggahan/ *Number of ports of call*	430	393	489	437	225
Bobot mati/*DWT*	902.751	843.495	902.273	853.404	371.899
Bongkar/*Unloading*	138.575	163.003	263.404	257.467	134.394
Muat/*Loading*	40.054	41.100	65.030	39.052	21.743
Penumpang yang turun/ *Passangers disembarking*	13.280	7.101	17.204	15.464	5.763
Penumpang yang naik/ *Passangers embarking*	11.997	13.101	10.677	7.617	5.868
Unit Kapal/ *Unit of ships*	11	15	15	15	15

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun1984.
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.
Catatan : Tahun 1983 sampai dengan bulan Juni.
Note : Data of 1983 up to June.

c. Perhubungan Udara

Peranan sarana angkutan udara di Irian Jaya sangat dominan terutama dalam menunjang perkembangan perekonomian masyarakat maupun dalam menunjang tercapainya Wawasan Nusantara. Dengan demikian ditingkatkannya sarana angkutan udara, semakin dirasakan betapa dekat Irian Jaya dengan bagian Indonesia lainnya (Dari Sabang-Merauke). Hal ini juga akan semakin memperkokoh Wawasan Nusantara dilihat dari kemampuan segi mobilitas manusia dan barang.

Dari tahun ke tahun produksi angkutan udara semakin meningkat. Ini berarti menggambarkan, sarana angkutan udara semakin berkem-

Tabel / *Table III — 46*

KEGIATAN PELAYARAN LOKAL DI IRIAN JAYA TAHUN 1979 S/D 1983
LOCAL SHIPPING ACTIVITIES IN IRIAN JAYA, 1979 — 1983

Uraian *Legend*	1979	1980	1981	1982	1983
Call/*Call*	929	883	991	720	307
DWT	80.611	59.209	90.688	102.704	60.005
Bongkar/*Unloading*	24.283	14.513	21.435	25.370	11.456
Muat/*Loading*	22.720	16.339	20.358	26.913	8.934
Penumpang Turun/ *Passengers disembarking*	4.653	4.038	4.297	4.197	1.459
Penumpang Naik/ *Passengers embarking*	4.412	3.969	5.854	4.927	1.945

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984.
Source : Monograph of Irian Jaya, 1984.

Catatan : Tahun 1983 sampai dengan bulan Juni.
Data : Up to June 1983.

bang. Kebutuhan akan jasa angkutan udara dan jasa perekonomian masyarakat dapat tercapai.

Pembangunan pelabuhan udara berikut fasilitasnya di berbagai kota Kabupaten dimaksudkan sebagai sarana penunjang pengoperasian pesawat-pesawat jenis besar. Disamping membangun pelabuhan udara di ibukota Kabupaten juga telah banyak dibangun dan dikembangkan lapangan terbang-lapangan terbang Perintis yang tak kalah pentingnya dalam menunjang kebutuhan masyarakat pedalaman.

Dari 10 buah lapangan udara yang tersebar di beberapa tempat di Irian Jaya pada tahun 1983 tercatat ukuran landasan antara 650 x 20 m - 3.570 x 45 m. Lihat Tabel III-47 dan III-48.

Seirama dengan lajunya perkembangan teknologi, semakin dirasa betapa pentingnya peranan Meteorologi dan Geofisika karena data yang disajikan oleh bidang ini menjadi pegangan dan sebagai landasan bagi sektor-sektor lain dalam menentukan kegiatannya, seperti pertanian, penerbangan, pelayaran, dan transmigrasi.

Sesuai dengan sasaran pengembangan sektor perhubungan di Irian Jaya yaitu penyediaan sarana dan prasarana untuk lebih memperlancar kegiatan sektor ini maka langkah kebijaksanaan ditempuh melalui: Perluasan dan penyempurnaan fasilitas meteorologi dan geofisika baik dalam kwalitas maupun kwantitas; Meningkatkan pelayanan jasa meteorologi sampai ke pelabuhan-pelabuhan dan lapangan terbang perintis serta daerah transmigrasi; Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personal dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

In 1983, there were 5 local shipping companies in Irian Jaya with a total fleet of 27 ships and 2,200 DWT. They were: PT Tembagapura shipping with its main office in Biak; PT Prima Membramo Shipping with its main office in Jayapura; PT Coral Mas in Sorong; PT Telaga Rahmat Jaya in Sorong; and PT Kalimaro in Merauke.

Smallholders' shipping began growing in 1983 when several smallholders shipping establishments came into existence. Those establishments were Pautan Usaha Bakti, Cahaya Rahmat, Usaha Pangkep, Cendrawasih Jaya, all of them located in Jayapura; Biak Jaya in Biak; Teluk Mandar in Sorong; and Samudra Raya in Fak-Fak. Their fleet numbered 14 motorboats and 65 motorboats under agency terms, with a capacity of 913 m³.

To support shipping activities in the region, the state-owned shipping company (PELNI) opened pioneer shipping lines in 1980. The number of calls in the same year was 453, and rose to 614 and 645 in 1981 and 1982 respective!

Regarding safety at sea, in the District of Jayapura there are one light house, 2 minor gas light houses, 2 minor light towers, 1 buoy, 3 minor buoys, and 5 sea marks; in the District of Biak are 9 gas light houses, 3 electric light houses, 1 buoy, 3 minor buoys; in the District of Manokwari are 1 light house, 3 gas light marks, 3 electric light marks and 3 minor buoys; in the District of Sorong are 1 light tower, 14 gas light marks, 2 electric light marks, 7 buoys, and 4 minor buoys; in the District of Merauke are 3 gas light marks, 1 PLBW light, and 2 buoys; in the District of Fak-Fak are 2 gas light marks, 2 electric light marks, 2 PLBW lights, 2 minor buoys, and 1 sea mark.

c. *Air Communication*

Air transport plays a very dominant role in the economic field and other activities of the region. The number of passangers and amount of cargoes transported by air experienced an increasing trend from one year to another. It means that civil air transport industry is continuing to develop to meet the generally increasing demand for air travel.

Efforts have also made to build new airports and expand the existing ones in every district that is able to accomodate large aircrafts. In addition, the pioneer airports have also been built or expanded, especially in the remote or hinterland areas. In the meantime, up to 1983 there were 10 airports with runways measuring from 650 to 3,570 m long and 20 to 45 m wide. See Tables III-47 and III-48.

Tabel / *Table III — 47*

DATA FASILITAS PELABUHAN UDARA DAN JUMLAH LAPANGAN TERBANG KAWASAN, JUMLAH LAPANGAN TERBANG DI PEDALAMAN IRIAN JAYA TAHUN 1983
NAME OF AIRPORT FACILITIES, TYPES OF AIRCRAFTS SERVED AND NUMBER OF AIRPORTS BY DISTRICT IN IRIAN JAYA IN 1983

No.	Nama Pelabuhan Udara/Kabupaten *Name of airport*	Ukuran Landasan (P × L × M) *Measures of runway (m)*	Kapasitas *Type of aircraft served*	Fasilitas Telekomunikasi/navigasi *Facilities of telecommunication navigation*	Jumlah Lapter Kawasan *Number of airports*	Pemth. *Government*	MAF *MAF*	AMA *AMA*	Swasta *Private*	Jumlah *Total*
1.	Mokmer-Biak/Tel. Cend	3.570 x 45	DC.10	NDB-DVOR-DME	2 Buah	3	-	-	-	3
2.	Sentani/Jayapura	1.750 x 30	F.28	NDB	7 Buah	14	32	5	2	52
3.	Mopah/Merauke	1.850 x 30	F.28	NDB	4 Buah	7	12	7	-	26
4.	Rendani/Manokwari	1.200 x 30	F.27	NDB	-	7	19	5	-	31
5.	Nabire/Paniai	1.150 x 30	F.27	NDB	8 Buah	7	21	11	-	-
6.	Jefman/Sorong	1.650 x 30	F.28	NDB-DVOR-DME	2 Buah	3	2	1	1	7
7.	Wamena/Jayawijaya	1.500 x 30	F.27	NDB	2 Buah	8	72	8	1	87
8.	Torea/Fak-Fak	630 x 30	DHC.6	NDB	2 Buah	4	7	-	4	15
9.	Timika/Tembagapura	1.800 x 45	F.28	-	-	-	-	-	-	-
10.	Serui/Yapen Waropen	650 x 20	DHC.6	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah/*Total*	-	-	-	27 Buah	53	165	37	8	260

Sumber data : Perencanaan Kanwil V Dit Jen Perhubungan Udara.
Data source : Regional Office V of Directorate General for Air Communication.

5. Pos dan Telekomunikasi

Pembangunan pos dan giro di Propinsi Dati I Irian Jaya diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan sarana/prasarana ke daerah-daerah terpencil sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari 117 buah kecamatan sebanyak 77 buah kecamatan telah didirikan Kantor Pos, Kantor Pos Pembantu dan Rumah Pos. Ini berarti baru sekitar 65,86% yang berjumlah 83 buah. Sedangkan 40 buah kecamatan lagi (34,18%) belum ada pelayanan.

In line with the ever-growing technology, meteorological and geophysical data become most important as basic information in determining certain activities in the various sectors of development, such as agriculture, aviation, navigation, and even transmigration.

In the framework of accelerating activities in the meteorological and geophysical field, measures have been taken to cover : the expansion and perfection of the facilities both in terms of quality and quantity; the increase of meteorological services provision extending to every airport and pioneer airport as well as transmigration areas; the amelirotion of personnel's capability and skills in order to promote the quality of services.

Tabel / *Table III — 48*

DAFTAR NAMA OPERATOR DAN JUMLAH ARMADA PESAWAT TERBANG YANG BEROPERASI DI WILAYAH PENERBANGAN V IRIAN JAYA TAHUN 1978 S/D 1983 (BULAN JULI)
NAME OF AIRWAYS AND FLEET OPERATING IN AVIATION REGION V OF IRIAN JAYA DURING 1978 TO 1983

No Nama Operator/Perusahaan Penerbangan *Name of Airways*	Tahun / *Year*						Keterangan *Remarks*
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
1. PT. MNA (Merpati Nusantara Air Lines) *Merpati Nusantara Air Lines (MNA) Ltd.*	8	6	7	9	12	10	
2. PT. GIA (Garuda Indonesia Airways) *Garuda Indonesian Airways (GIA) Ltd.*	3	3	3	3	3	3	
3. PT. PAS (Pelita Air Service) *Pelita Air Service (PAS) Ltd.*	16	18	9	4	4	5	
4. PT. BOUEOQ Bali Air *Bouraq Bali Air Ltd.*	-	6	6	6	-	-	
5. MAF (Missionary Aviation Fellowship) *Missionary Aviation Fellowship (MAF)*	17	17	17	19	17	16	
6. AMA (Associated Mission Aviation) *Associated Mission Aviation (AMA)*	3	3	4	4	4	6	
7. SDA (Seven Day Adventist) *Sevent Day Adventist (SDA)*	2	2	4	2	2	5	
8. PT. DAS (Dirgantara Air Service) *Dirgantara Air Service (DAS) Ltd.*	-	3	1	3	1	3	
9. PT. Derazona Air Service *Derazona Air Service (IAT) Ltd.*	4	4	-	-	-	2	
10. PT. IAT (Indonesian Air Trans) *Indonesian Air Transport (IAT) Ltd.*	1	2	1	3	-	-	
11. PT. ASI (Airfast Service Indonesia) *Airfast Service Indonesia (ASI) Ltd.*	2	2	12	6	3	6	
12. PT. NUH (National Utility Helikopter) *National Utility Helicopter (NUH) Ltd.*	4	-	-	-	-	2	
13. PT. Indo Avia *Indo Avia Ltd*	-	-	1	1	-	-	Sudah tidak beroperasi *ceased operation*
14. UNCEN/SIL (Summer Institute of Linguistice) *Summer Institute of Linguistics (UNCEN/SIL)*	3	3	3	3	3	5	
15. Air Niugini	1	1	1	2	1	-	
16. RBMU (Regions Beyond Missionary)/ *Regions Beyond Missionary (REMU)*	2	3	2	2	2	2	
17. BETHEL NRC	-	-	-	-	-	2	
18. PT. DAT (Deraya Air Taxi)/ *Deraya Air Taxi (DAT) Ltd.*	-	-	-	-	-	1	
19. AURI (Angkatan Udara RI) *AURI/Indonesian Air Force*	2	2	20	13	5	4	
20. ADRI (Angkatan Darat RI) *ADRI/Indonesian Army*	-	-	-	3	2	4	
Jumlah / *Total*	68	75	91	83	59	76	

Sumber data : Perencanaan Bidang Kapen Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Source : Regional Office V of the Directorate

Kegiatan pelayanan pos dan giro tersebut menyebar di 9 daerah Kabupaten dengan perincian sebagai berikut : Jayapura dengan 22 buah kecamatan telah didirikan sebanyak 15 buah dan yang sudah ada pelayanan sebanyak 12 buah kecamatan; Yapen Waropen dengan 5 buah kecamatan didirikan sebanyak 5 buah sudah melayani kegiatan ini. Kabupaten Teluk Cendrawasih dengan 8 buah kecamatan memiliki 7 buah dan sudah berfungsi. Di Kabupaten Manokwari dengan 12 kecamatan sudah memiliki bangunan pos dan giro sebanyak 6 buah yang berfungsi. Kabupaten Sorong dengan 15 buah kecamatan memiliki 13 buah bangunan dan yang berfungsi hanya 10 kecamatan. Kabupaten Fak-Fak dengan 8 buah kecamatan telah memiliki 5 buah bangunan yang sudah berfungsi di 5 kecamatan. Kabupaten Merauke dengan 18 buah kecamatan sudah memiliki bangunan pos sebanyak 13 buah dan kesemuanya telah berfungsi. Kabupaten Paniai dengan 17 buah kecamatan memiliki gedung pos sebanyak 12 buah dan berfungsi. Sedangkan di Kabupaten Jayawijaya dengan 12 buah kecamatan memiliki 7 buah gedung pos juga sudah berfungsi.

Adapun perkembangan lalu lintas surat dan paket pos, wesel pos, giro dan cek pos dan Tabanas selama Pelita III di Irian Jaya dapat disimak dalam tabel berikut. Tabel III-49 III-50 dan III-51.

Pembangunan sub sektor telekomunikasi sesuai dengan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara menyediakan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri sebagai layaknya suatu perusahaan mengemban tugas sosial. Tujuan dilaksanakan pembangunan bidang ini untuk meningkatkan, mengembangkan sarana telekomunikasi untuk umum guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat agar menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan ketahanan Nasional.

5. Post and Telecommunication

The development of post and giro services is directed towards the expansion of network that will reach all parts of the region and simultaniously meet the people's demand.

There are 117 subdistricts throughout the region, of which 77 already have post offices or auxilliary post offices or post houses. It means that 65.86% of the subdistricts have been enjoying the postal services.

Following is the number of post offices by various districts : The District of Jayapura with 22 subdistricts has 15 post offices, of which 3 have not started operation; the District of Yapen Waropen with 5 subdistricts has 5 post offices; the District of Cendrawasih with 8 subdistricts has 7 post offices; the District of Manokwari with 12 subdistricts has 6 post offices; the District of Sorong with 15 subdistricts has 13 post offices of which 3 are not operating yet; the District of Fak-Fak with 8 subdistricts has 5 post offices; the District of Merauke with 18 subdistricts has 18 post offices; the District of Paniai with 17 subdistricts has only 12 post offices; and the District of Jayawijaya with 12 subdistricts has 7 post offices.

In the meantime, the number of letters, and parcels sent by mail, and money orders, giro & postal cheques per year can be observed in the Table here under. See Tables III-49, III-50 and III-51.

The State-Owned Telecommunication Enterprise (Perumtel) Regional XII Irian Jaya is responsible for the provinsion of telecommunication services in the region.

The development of telecommunication is directed toward the expansion of telecommunication lines and networks, as well as the advancement of telecommunication facilities (from manual to automatic system); and the promotion of services.

Tabel / *Table III — 49*

LALU LINTAS SURAT DAN PAKET DI KANTOR POS SELURUH IRIAN TAHUN 1979 S/D 1983

NUMBER OF LETTERS AND PARCELS SENT BY POST OFFICES IN IRIAN JAYA DURING 1979 TO 1983

Tahun *Year*	Surat Pos Biaya & Kilat *Ordinary/Express letters*		Surat Pos Tercatat *Registered letters*		Paket Pos *Postal parcels*	
	Kirim *Mailed*	Terima *Received*	Kirim *Mailed*	Terima *Received*	Kirim *Mailed*	Terima *Received*
	1.851.053	3.094.144	102.718	123.815	2.415	15.062
	2.206.535	3.256.677	117.267	149.779	2.325	18.801
	2.769.415	3.699.761	132.612	179.188	2.182	20.552
	2.815.696	3.652.872	146.237	195.271	2.130	20.360
	3.013.407	3.647.844	161.024	179.863	2.120	25.042

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984

Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

Untuk itulah kegiatannya dilaksanakan melalui kebijaksanaan meningkatkan dan memperluas jariangan telekomunikasi dari kota-kota ke daerah pedalaman juga penterapan sarana dengan sistem manual menjadi otomat. Langkah berikutnya ialah memperluas jaringan telekomunikasi dengan mendirikan Statium Bumi Kecil di daerah-daerah pedalaman. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi.

Perumtel XII Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya dilayani oleh kantor-kantor Unit Pelaksana Tehnis meliputi :

a. Bidang telepon, yang terbagi menjadi 5 buah Kantor Daerah Telepon yaitu : Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke dengan 11 Kantor cabang transmisi.
b. Bidang Telegraf seperti pada bidang telepon, tetapi hanya Biak dan Manokwari saja yang masing-masing punya 2 Kantor cabang.
c. Seksi Radio yaitu Kantor Radio XII/5 Jayapura.
d. Stasiun Bumi, wilayah Propinsi Irian Jaya mempunyai 14 stasiun Bumi yang terbagi menjadi 1 stasiun Bumi Besar (Jayapura) 6 stasiun Bumi sedang (Biak, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Tembagapura, Merauke) dan 7 stasiun Bumi Kecil di Wamena, Serui, Nabire, Sarmi, Teminabuan, Kaimana dan Tanah Merah.

Selama Pelita III perkembangan telekomunikasi di Irian Jaya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Telekomunikasi otomat pada tahun 1976 berjumlah 400 buah, pada tahun 1983 meningkat menjadi 6000 buah atau meningkat 15 kali.
Begitu pula telex pada tahun 1980 berjumlah 100 buah pada tahun 1983 meningkat menjadi 150 buah atau meningkat sekitar 1,5 kali. Jumlah sambungan induk telepon otomat pada tahun 1976 berjumlah 334 LU. Pada tahun 1983 meningkat menjadi 3.913 LU atau hampir 12 kali lipat. Begitu juga sambungan induk telex pada tahun 1976 44 LU. Pada tahun 1983 meningkat menjadi 109 LU atau hampir 2,5 lipat.

Dari kapasitas akan terlihat bahwa kapasitas bersambung telepon meningkat 11,7% per tahun, dan telex meningkat 2,4% per tahun. Produksi telepon lokal otomat + SLJJ pada tahun 1980 sebesar 10.546.408 pada tahun 1982 meningkat menjadi 53.166.940 atau 5 kali lipat. Lihat Tabel III-52.

6. Pariwisata

Pembangunan di bidang kepariwisataan di Irian Jaya masih dalam taraf/penggantian potensi kepariwisataan. Dengan membangun/memugar tempat rekreasi dan tempat-tempat/benda-benda bersejarah, maka disamping bertujuan untuk meningkatkan volume wisatawan, sekaligus merupakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Tujuan dan Sasaran selanjutnya pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk menunjang perekonomian dan memperluas lapangan kerja diberbagai sektor yang berkait dengan dunia kepariwisataan.

Obyek kepariwisataan di Irian Jaya umumnya berupa keindahan alam, keindahan pantai-pantai, tugu-tugu/monumen budaya masyarakat dan lain-lain yang menarik, tersebar di seluruh daerah Irian Jaya. Potensi kepariwisataan yang telah berhasil diinventarisasi hingga Repelita III ialah :

- Kabupaten Jayapura, Pantai Base C, Pantai Engros, Pantai Hamadi, Pantai Abe, Pantai Holtekang, Danau Sentani, Air terjun Kemiri, Tugu Mac Arthur, Tugu Papera, Tugu Jos Sudarso, Tugu Hamadi.
- Kabupaten Jayawijaya : Lembah Baliem, Danau Garam, Puncak Salju, Mumi (Giwiko), Piramid, Aikima, Pikhe, Waisaput.
- Kabupaten Biak Numfor : Pantai Nosnik, Pantai Papare, Tanjung Bakaro, Danau Anggi, Amban.

Tabel / *Table III — 50*

LALU LINTAS WESEL POS

POSTAL MONEY ORDER TRAFFIC

Tahun *Year*	Dalam Negeri *Domestic*		Luar Negeri *Overseas*	
	Penerimaan (Rp) *Receipt*	Pembayaran (Rp) *Payment*	Penerimaan *Receipt*	Pembayaran *Payment*
1979	3.313.858.836	748.286.004	-	13.327.096
1980	5.236.931.229	941.270.453	-	11.446.443
1981	6.467.226.664	1.035.161.576	-	14.516.949
1982	7.678.600.040	1.208.501.921	6.633,92	13.430.793
1983	8.991.155.757	1.633.588.509	499.139	16.759.318

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984

Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

Tabel / *Table III — 51*

LALU LINTAS GIRO & CEK POS & TABANAS

TRAFFIC OF GIRO AND POSTAL CHEQUE AND "NATIONAL DEVELOPMENT SAVINGS" (TABANAS)

Tahun *Year*	Giro Pos & Cek Pos *Giro & Postal Cheque*		Tabanas *National Development Savings*	
	Setoran *Payment*	Pembayaran *Savings*	Penabungan *Payment*	Pembayaran
1979	92.635.335	74.020.967	700.220.294	584.813.187
1980	95.233.787	119.796.411	1.187.417.730	897.583.491
1981	310.736.997	221.708.047	1.262.967.274	1.174.541.367
1982	1.527.646.875	1.328.031.536	1.587.335.595	1.496.736.329
1983	1.853.095.495	1.562.546.148	1.622.559.003	1.553.729.369

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984

Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

In the meantime, in the framework of enhancing services, the improvement of personnels' ability and skills is always given much attention.

Perumtel Regional XII Irian Jaya is now operating :

a. Five (5) telephone offices and 11 transmission stations throughout Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, and Merauke.
b. Five (5) telegraph offices, one each in Jayapura, Biak, Manokwari, Sorong, and Merauke (Biak and Manokwari telegraph offices each has two (2) transmission stations);
c. Radio Section K II/5 in Jayapura; and
d. Fourten (14) earth station satellites, comprising one (1) large-size earth station (in Jayapura), 6 middle-size earth stations (in Biak, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Tembagapura, and Merauke), and 7 small earth stations (in Wamena, Serui, Nabire, Sarmi, Teminabuan, Kaimana and Tanah Merah).

During Pelita III the telecommunication development in this province experienced a rapid progress: automatic transmissions rose from 400 sets in 1973 to 7,000 sets in 1983, increasing fifteen times; telex from 100 sets in 1980 to 150 in 1983, growing by 1.5 times; Automatic telephone exchange from 334 in 1976 to 3,913 in 1983, increase by nearly 12 times; and telex exchange from 44 in 1976 to 109 in 1983, augmenting by 2.5 times. Telephone exchange capacity registered an annual increase of 11.7%, and telex exchange capacity scored 2.4%.

In 1980 some 10,546,408 telephone calls, comprising local calls and long distance calls, were made. The number rose to 53,166,940 calls in 1982, increasing five times. See Table III-52.

6. Tourism

The development of tourism in Irian Jaya is still implemented in the phase of discoverng the tourism potentials. In this phase, the establishment/rehabilitation of recreation areas and of historical areas/remains have been implemented in order to increase the volume of tourist flow besides to maintain the natural resources and the environment.

The next objective and target will be to support the economy and to enlarge job opportunities in various sectors related with the field of tourism.

Tourist objects in Irian Jaya generally consists of the natural beauties, the beauty of the beaches, the cultural monuments and some others which are of interesting tourist attractions spreading over the whole area of Irian Jaya.

The tourist potentials which have been listed in the inventory up to the Repelita (Five-Year Development Plan) III are :

– The District of Jayapura: Base G Beach, Engros Beach, Hamadi Beach Abe Beach, Holtekang Beach, Lake Sentani, Kemiri Waterfall, The Mac-

Tabel / *Table III — 52*

SARANA TELEKOMUNIKASI DI IRIAN JAYA

TELECOMMUNICATION FACILITIES IN IRIAN JAYA

Uraian / *Description*	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1. TELEPON/*Telephone*								
Butir : 1. Sentral Telepon/ *Telephone Exchange*								
a. Otomat/*Automatic*	1	1	1	1	2	5	5	5
b. Manual/*Manual*	10	10	10	10	8	5	8	10
2. Kapasitas Sentral *Telephone Exchange Capacity*								
a. Otomat/*Automatic*	400	400	400	400	2200	5.200	6.000	6.000
Manual/*Manual*	3.400	3.400	3.400	3.950	2.750	1.450	1.650	1.750
3. Sambungan Induk/ *Central Connection*								
a. Otomat/*Automatic*	334	363	361	359	1.688	3.330	3.809	3.913 - Juni
b. Manual/*Manual*	2.629	2.824	3.053	3.323	2.294	1.051	1.175	1.234 - Juni
2. TELEX/*Telex*								
Butir : 1. Sentral Telex/*Telex Excange*	-	-	-	-	1	2	2	2
Kapasitas Sentral/ *Telex Exchange Capacity*	-	-	-	-	100	150	150	150
3. Sambungan Induk/ *Telex Exchange Connection*								
a. Berbayar/*Commercial*	-	-	-	-	31	65	84	89
b. Dinas/*Official*	-	-	-	-	13	20	20	20
3. TELEGRAP/*Telegraph*								
Butir : 1. Kantor Telegrap/*Telegraph Office*	5	5	5	2	-	-	-	-
Kantor Cabang Telegrap/ *Telegraph Branch Office*	11	11	11	-	-	-	-	-
3. Kantor Daerah Telegrap&Radio *Regional Telegraph & Radio Office*	-	-	-	3	4	4	4	4
4. Kantor Cab. Telegrap & Radio *Telegraph and Radio Branch Office*	-	-	-	10	10	10	9	4
5. Kantor Daerah Telegrap&Telex *Regional Telegraph & Telex Office*	-	-	-	-	1	1	1	1
4. SEKSI RADIO/								
Butir : *Radio Section*								
1. Kantor Seksi Radio/ *Radio Section Office*	5	5	5	2	1	1	1	1
5. STASION BUMI *Earth Station*								
Butir : 1. Station Bumi Besar/ *Large Earth Station*	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Stasion Bumi Sedang/ *Medium Earth Station*	6	6	6	6	6	6	6	6
3. Stasion Bumi Kecil/ *Small Earth Station*	-	-	-	-	-	2	7	7

Sumber data : KAWITEL XII Irian Jaya.

Source : Telecommunication Office Regional XII Irian Jaya.

- Kabupaten Paniai : Danau Nisel, Lembah Monamani, Pulau Anggrameos, Enarotali Wagete.
- Kabupaten Sorong : Tanjung Kasuari, Pulau Raja Ampat, Pulau Jefman, Klamono dan Hutan wisata.
- Kabupaten Yapen Waropen, Fak-Fak dan Merauke potensi pariwisatanya adalah pantai.
- Kabupaten Manokwari : Pantai Pasir Putih, Pantai Tanjung Bakaro, Danau Anggi dan Wisata Bahari (wisata tirta).
- Kabupaten Merauke : Sumber Air Panas, Kawasan Asmat, Wisata Buru, Wisata Satwa, Marga Satwa, Museum Agats dan Kawasan Digul/Tanah Merah.

Dalam Repelita III banyak dilakukan pembangunan tempat rekreasi seperti pantai Base G, pemugaran gua Jepang di Biak dan pembangunan Taman Budaya Nasional di Jayapura. Selain kegiatan tersebut juga telah dilaksanakan kegiatan penataran kepada tenaga-tenaga perhotelan, restoran, biro perjalanan dan lain-lain dalam rangka peningkatan tenaga trampil di bidangnya masing-masing.

Sarana pendukung kepariwisataan di Irian Jaya seperti Biro dan Agen Perjalanan sebanyak 19 buah, Hotel/Penginapan sebanyak 40 buah terdiri dari 541 kamar dan 1.085 buah tempat tidur, restoran/rumah makan sebanyak 48 buah dan intertaimont sebanyak 55 buah terdapat di seluruh daerah Kabupaten. Sedang perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Irian Jaya tahun 1979 - 1983 terutama wisatawan domestik tiap tahun bertambah. Lihat Tabel III-53.

Arthur Monument, The Pepera Monument, The Jos Sudarso Monument and The Hamadi Monument.

- *The District of Jayawijaya: The Baliem Valley, The Salt Lake, The Snow Peak, The Mummy (Giwiko), The Piramid, Kikima, Phike, and Waisaput.*
- *The District of Biak Numfor: Nosnik Beach, Papare Beach, Tanjung (Cape) Bakaro, Lake Anggi, and Amban.*
- *The District of Paniai: Lake Wisel, Monamani Valley, Anggrameos Island, and Enaratoli Wagate.*
- *The District of Sorong: Tanjung Kasuari, Raja Ampat Island, Jefman Island, Klamono, and the Reservation Forest.*
- *The District of Yapen Waropen: Fak-Fak and Merauke which have beaches being their tourism potentials.*
- *The District of Manokwari: Pasir Putih (the White Sand) Beach, Tanjung Bakaro Beach, Lake Anggi, and the Marine Tourism.*
- *The District of Merauke: The Hot Spring, The Asmat Area, Safari Tourism, animals' Reservation, The Agats Museum, and the Digul/Tanah Merah Area.*

During the Repelita III, a large number of establishment of recreation areas had been completed, for instance, the establishment of Base G Beach, as well as the renovation of the Japanese Occupation Army's Bunker in Biak, and the establishment of the National Cultural Park in Jayapura. Besides, some up-grading courses had been given to hotel, restaurant and travel agent per-

Tabel / *Table III — 53*

VOLUME ARUS WISATAWAN DI IRIAN JAYA SELAMA REPELITA III
THE VOLUME OF TOURIST FLOW IN IRIAN JAYA DURING REPELITA III

Tahun *Year*	Wisatawan Domestik *Domestic Tourist*	Wisatawan Asing *Foreign Tourist*
1979	27.475 orang	3.734 orang
1980	27.532 orang	3.766 orang
1981	32.069 orang	3.191 orang
1982	31.072 orang	2.468 orang
1983	37.419 orang	2.755 orang

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of Regional Forth Five-Year Development Plan (Repelita IV) of Irian Jaya Province.

Dari kunjungan wisatawan tersebut pengeluaran pembelanjaan (expenditure) yang diterima di daerah Irian Jaya merupakan salah satu sumber pendapatan yang menunjang kehidupan/kegiatan perekonomian daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan adalah kondisi Irian Jaya yang khusus, keterbatasan prasarana dan sarana serta biaya transportasi yang mahal.

Untuk pembangunan obyek-obyek wisata yang memadai belum cukup relevan, sehingga belum dapat dikembangkan secara ekonomis, dimana tujuan pembangunan kepariwisataan justru untuk menunjang pembangunan sosial ekonomi.

Disamping itu promosi kepariwisataan juga telah dilakukan seperti siaran-siaran melalui RRI Jayapura, penerbitan buletin, brosur, poster dan liflet. Obyek pemasaran kepariwisataan terutama daerah-daerah Jayapura, Biak, Sorong, Merauke (Asmat) dan Wamena.

7. Perdagangan

a. Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan pembangunan sub sektor perdagangan dalam negeri di Irian Jaya meliputi perdagangan antar pulau masuk ke wilayah Irian Jaya, perdagangan antar pulau keluar wilayah Irian Jaya dan usaha niaga (Surat Ijin Usaha Perdagangan). Sebagian besar kebutuhan daerah Irian Jaya masih terus didatangkan dari luar, terutama melalui perdagangan Antar Pulau yang masuk ke wilayah ini. Pemasukan barang-barang tersebut pada umumnya disupply dari Pulau Jawa (Jakarta-Surabaya), sedikit dari Bitung (Manado), sedangkan dari Kupang (NTT) berupa hewan potong (ternak sapi).

Pada tahun 1982 volume barang yang diperdagangkan mencapai 233.336,65 ton dengan nilai Rp60,98 milyar. Tahun sebelumnya nilai tersebut hanya Rp36,57 milyar.

Barang-barang tersebut diatas pada umumnya adalah meliputi segala kebutuhan masyarakat banyak dan Pemerintah, mulai dari barang-barang yang sekecil-kecilnya sampai kepada kebutuhan barang yang besar, dan umumnya tidak termasuk barang-barang kebutuhan perusahaan-perusahaan besar seperti PMA/PMDN, PERUM, PERJAN dan PERSERO, dimana biasanya kebutuhan barang-barang perusahaan ini didatangkan sendiri.

Hasil-hasil produksi dari daerah Irian Jaya yang diantarpulaukan keluar wilayah Irian Jaya terdiri dari barang-barang dalam pengawasan (yang tata niaganya diatur oleh pemerintah) dan barang-barang yang tata niaganya tidak diatur secara khusus. Barang-barang antar pulau yang dalam pengawasan terdiri dari kopra, cengkeh, dan kayu.

Selain itu, komoditi yang diantarpulaukan dari wilayah Irian Jaya adalah : Coklat, biji pala, kulit masoki, damar dan hasil laut. Daerah tujuan antar pulau tersebut adalah Ujung Pandang dan Surabaya. Kegiatan perdagangan antar pulau keluar Irian Jaya pada tahun 1982 berjumlah 17.867.217 ton/m3 dengan nilai Rp9.919.207,06. Dan bila dibandingkan dengan realisasi antar pulau tahun 1981 berjumlah 19.732,51 ton/m3 dengan nilai Rp14.806.376,80 maka mengalami penurunan sebesar 9,45%. Penurunan ini antara lain disebabkan adanya penurunan harga komoditi antar pulau eks Irian Jaya di pelabuhan tujuan, dimana hal ini berakibat kurang bergairahnya para petani untuk memproduksi barang-barang tersebut. Selama tahun 1982 Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan berjumlah 1.645 buah.

Dibandingkan dengan penerbitan SIUP dalam tahun 1981 sebanyak 1.432 buah berarti mengalami kenaikan sebesar 213 buah atau 7,72%. Kenaikan ini cukup berarti karena dengan adanya persyaratan pemilikan SIUP bagi perusahaan jasa pembangunan (kontraktor) yang menonjol dalam permintaan SIUP.

b. Perdagangan Luar Negeri

Komoditi ekspor dari wilayah Irian Jaya terbagi dalam 4 sektor yakni **Sektor Hasil Tambang** terdiri dari minyak bumi dan konsentrat tembaga. **Sektor Hasil Laut/Sungai** yaitu udang, ikan tuna, kepiting, sirip

sonnel, and to others as well, in order to increase the number of skilled personnel in their respective fields.

The tourist facilities which support the sector of tourism in Irian Jaya are composed from travel agents, hotels/lodging-houses, restaurants/eating places, and entertainment centres. There are 19 travel agents, 40 hotels/lodging-houses having 541 rooms and 1.085 beds, 43 restaurants/eating places and 55 entertainment centres scattered in the whole districts. Meanwhile, the number of tourists visiting Irian Jaya from 1979 to 1983 especially that of domestic tourists indicated the annual growth. See Table III-53.

The expenditure of the tourists during their visits in Irian Jaya had become one of the province's sources of income which supported the economic life of the province.

The problems being faced in developing the sector of tourism in this province have been the conditions of Irian Jaya which are so specific, besides the limited means and facilities, and as well as the expensive cost of transportation.

Several tourist potentials are not yet developed adequately so as to become an economic asset in accordance with the objective of tourism development that is to support the socio-economic development.

Apart from the above-mentioned efforts, promotion for tourism had been launched by means of radio broadcast by the RRI (Radio Republik Indonesia = The Radio of the Republic of Indonesia) Jayapura, publication of bulletins, brochures, posters and leaflets. The objects which have been launched to the market of tourism are Jayapura, Biak, Sorong, Merauke (Asmat) and Wamena.

7. Tourism

a. Domestic Trade

The development of the sub-sector of domestic trade in Irian Jaya covers the inter-insular activities of trade by which the commodities are brought to and from Irian Jaya area. Along with the above, the trade activity also covers the trade administration (Surat Ijin Usaha Perdagangan = Licence of Trade Permit).

The greater part of the necessities of Irian Jaya have to be brought from outside the area, chiefly by the inter-insular trade. the commodities needed for Irian Jaya are generally supplied from Jaya Island (Jakarta and Surabaya), a small part of which from Bitung (Manado), while cattle (oxen for consumption) are brought from Kupang in NTT (Nusa Tenggara Timur = East Nusa Tenggara).

In 1982 the volume of trade was 233.336,65 tons of commodities valued at Rp 60,98 milliards. In the previous year, the value of the trade was only Rp 36,57 milliards.

In general, the commodities included all necessities of the inhabitants and of the Government as well, from the minor to the major necessities. These commodities are usually not required by large companies, such as the PMA (Penanaman Modal Asing = Foreign Investment) companies, PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri = Domestic Investment) companies, PERJAN (Perusahaan Jawatan = State-owned Company) and PERSERO (Shareholding Company), which generally purchase their necessities by themselves.

The commodities produced from Irian Jaya for other areas outside Irian Jaya by the inter-insular trade consist of the controlled commodities (that is, the trade administration for these commodities is proceeded by the Government) and those which do not require specialised trade administration. The controlled commodities include copra, clove and timber.

Besides the above controlled commodities, the others include chocolate, nutmeg seed, masoki skin, resin and sea-produces for trade with the other islands. This inter-insular trade is among Irian Jaya, Ujungpandang and Surabaya. The volume of the inter-insular trade by weight of commodities brought from Irian Jaya in 1982 was 17.867.217 tons/cubic metres valued at Rp 9.919.207,06. Compared with the volume of trade in 1981 which was 19.732,51 tons/cubic metres with value of Rp 14.806.376,80, there had been the decrease of 9,45 %. This decrease was due to among others the decline of prices of commodities from Irian Jaya at the destination ports, which then caused the farmers to become reluctant to grow these land-produces. During 1982 the Government had issued 1.345 licences of trade permit.

Compared with the number of the SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan = Licence of Trade Permit) issued in 1981 which was 1.432, it means an increase of 213 SIUP or similar to 7,72 %. This increase had been quite meaningful because the companies that had obtained the above SIUP were mostly the construction companies (contractors) which meant that the development of physical facilities in Irian Jaya had run well enough.

b. Foreign Trade

The export commodities from Irian Jaya are divided into four sectors. They are the sector of mine products consisting of oil and consentrated copper, the sector of sea/river produces composed from shrimp, tuna fish, crab, shark fin, crocodile's skin, star fish, green mussel, oyster shell, lolo, logo gem stone,

ikan hiu, kulit buaya, teripang, siput hijau, kulit mutiara, lolo, batu logo, kulit kerang, kulit ular laut, ikan teri dan ikan kakap. Sektor Hasil Perkebunan terdiri dari biji pala, bunga pala dan coklat.

Realisasi ekspor Irian Jaya selama tahun 1983, adalah bernilai US$ 550.127.325,42. Nilai ekspor dalan tahum 1983 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 26,82% (US $ 201.671.355,45) jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 1982 yaitu dari US $ 751.798.680,87 turun menjadi US$ 550.127.325,42 (1983). Nilai ekspor dalam tahun 1982 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 8,66% jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 1981 yaitu dari US$ 823.066.470,27 turun menjadi US$ 751.782.709,65 (US$ 71.283.760,62).

Kegiatan ekspor ke luar negeri dilihat dari sektor dan jenis komoditi tahun 1985 menunjukkan bahwa peranan minyak bumi dan tembaga tetap dominan dan bernilai 286.622.495,90 US$ dan 103.402.698,07 US$, kemudian menyusul hasil laut/sungai. Sedangkan menurut realisasi ekspor manurut pelabuhan muat menunjukkan nilai 585.757.333,93 US$ pada tahun 1984, dan sebesar 410.970.739,90 US$ pada tahun 1985. Lihat Tabel III-54.

Tabel / *Table III — 54*

REALISASI EKSPOR KELUAR NEGERI MENURUT SEKTOR DAN JENIS KOMODITI TAHUN 1985
REALIZATION OF EXPORT TO FOREIGN COUNTRIES BY SECTOR AND KIND OF COMMODITY, 1985

No	Sektor / *Sector*	Jenis Komoditi / *Kind of Commodity*	Satuan / *Unit*	Volume / *Volume*	Nilai US$ / *Value in US $*
1	2	3	4	5	6
1.	Hasil hutan/ *Forest Produce*	Kayu gergajian/ *Sawn Timber*	m3	2.710,530	118.984,95
2.	Hasil perkebunan/ *Plantation Product*	Bunga pala/ *Nutmeg Flower*	ton	69,929	198.125,80
		Biji pala/*Nutmeg Seed*	ton	279,255	251.852,90
		Coklat/*Cacao*	ton	74,000	130.300,00
3.	Hasil laut/sungai/ *Sea & River Produce*	Udang/ *Shrimp*	ton	2.558,840	15.478.463,77
		Kulit buaya/ *Crocodile Skin*	inch	20,050	73.397
		Ikan tuna/laut *Tuna Fish*	ton	8.172,400	4.276.128,60
		Bia lola	ton	7,699	2.715,40
		Batu loga *Loga Gem stone*	ton	0,584	1.401,60
		Kepiting/*Crab*	ton	2,280	4.560,00
		Teripang/*Star Fish*	ton	0,600	1.500,00
		Sirip ikan hiu/ *Shark Fin*	ton	9,508	84.295,00
		Kerang/*Mussel*	ton	0,740	740,50
		Mutiara/*Pearl*	ton	0,147	320.000,00
		Perut ikan/*Fish Cut*	ton	0,081	81,00
		Ikan campuran/ *Mixed Fish*	ton		
4.	Hasil tembaga/ *Mine Product*	Minyak bumi/ *O i l*	Brl	10.148,000	286.622.495,90
		Konsrat tembaga/ *Concentrated Copper*	DMT	184.647.690	103.402.698,07
	Jumlah / *Total*		ton	11.176,044	
			m3	2.710,530	
			inch	20,050	410.970.739,99
			Brl	10.148.000	
			DMT	184.647,69	

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985.
Source : Irian Jaya in figures 1985.

Jika dilihat dari segi persentase Sorong merupakan pelabuhan yang terbesar melakukan ekspor. Tahun 1984 Sorong mengekspor sebanyak 76,72% dari seluruh ekspor Irian Jaya kemudian menyusul Amamapare 21%. Tahun 1985 Pelabuhan Sorong turun menjadi hanya 74,13% dan Amamapure naik menjadi 25,16%. Lihat Tabel III-55.

Perusahaan yang memperoleh ijin ekspor Angka Pengenal Ekspor (APE) di Propinsi Irian Jaya sebanyak 9 perusahaan pada tahun 1982 terdiri dari 8 perusahaan (eksportir umum 1 perusahaan eksportir dalam rangka PMA (Penanaman Modal Asing). Sedangkan perusahaan eksportir yang memperoleh perpanjangan APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara) yang ada sebanyak 4 perusahaan yang menyebar di 5 daerah Kabupaten, masing-masing 2 perusahaan di Jayapura yang memperoleh APES, 2 perusahaan yang memperoleh perpanjangan APES; di Teluk Cenderawasih ada 2 perusahaan yang memperoleh APES; di Manokwari 1 buah yang memperoleh APES dan juga 1 buah yang memperoleh perpanjangan APES; Sorong juga sama seperti di Teluk

shell, sea snake skin, and teri and kakap fish, and the plantation products consisting of pala seed and flower and cacao.

The realisation of export from Irian Jaya in 1983 was US $ 550.127.325,42 in value. The total export value of 1983 decreased by 26,82 % (US $ 201.371.355,45) compared with that of 1982 which was US $ 751.798.680,87. The total export value of 1982 decreased by 8,66 % if compared with that of 1981, that is from US $ 823.066.470,27 down to US $ 751.782.700,65 (US $ 71.283.760,629).

The export activities to foreign countries by sector and commodity in 1985 indicates that oil and copper had been the major commodities having the values of US $ 286.622.435,30 and US $ 103.409.698,07, followed with the sea/river produces. Whereas the realisation of export by port of departure was US $ 585.757.333,33 in value by 1984, and US $ 410.970.739,99 in 1985. See Table III-54.

By percentage, Sorong is the city by which the largest number of commodities are exported. In 1984, 76,72 % of the export from the whole Irian Jaya was departed from Sorong, followed by Amamapare with 21 % of the total export. In 1985, the percentage of export from the whole Irian through Sorong declined to 74,13 while the percentage of the total export by Amamapare, on the contrary, rose to 25,15. See Table III-55.

Tabel / *Table III — 55*

Pelita / *Pelita*	Nilai Ekspor Non Migas / *Export Value of Non Oil-and-Gas*	Nilai Ekspor Migas / *Export Value of Oil and Gas*	Jumlah Ekspor / *Total Export*
Pelita I	US$ 25.095.836	US$ 281.527.665	US$ 306.623.551
Pelita II	US$ 121.232.420	US$ 2.250.944.652	US$ 2.372.177.072
Pelita III	US$ 165.209.032	2.324.230.321	2.489.439.553

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of Regional Repelita IV of Irian Jaya.

There were 9 companies in Irian Jaya which had obtained the APE (Angka Pengenal Ekspor = Export Identification Number) in 1982, one of which was a generasi exporter, in line with the implementation of the PMA programme. Meanwhile, 4 companies in 5 districts had obtained the extension of APES (Angka Pengenal Ekspor Sementara = Provisional Export Identification Number) Two companies in Jayapura obtaining the APES, two others obtaining the extension of APES; two in Teluk Cendrawasih attaining the APES, one attaining the APES and one attaining the extension of it in Manokwari; while in Sorong the specification was the same as in Teluk Cendrawasih, and there were three in Merauke which had obtained the APES.

The total number of general exporter in this area during 1982 was 41 consisting of 12 holding the APES and 29 holding the APE. Compared with that in the former year which was 39, this means an increase by 2 exporters or 5,1 %. However, in 1982 there were 9 exporters which did not extend their APE/APES and therefore they had their APE/APES not valid, consisting of 5 APE holders and 3 APES holders.

The number of importer holding the TAPPI/TAPPIS (Tanda Angka Pengenal Perusahaan Impor/Tanda Angka Pengenal Perusahaan Impor Sementara = Import Identification Number/Provisional Importer Identification Number) in 1982 whose identity numbers were still valid, was 23 (specification attached here). There was a decline by 4 companies (importers) or 14,81 % in 1982 if compared with the number in 1981 which was 27.

The above-mentioned decrease was caused among others by the domestic production which have been in the position to compete with foreign production. The difficulty to the importers has been the transportation facility, that is, the number of foreign vessels which arrive in Irian Jaya is fairly limited and is relatively small when compared with that in other areas outside Irian Jaya.

The comparison between the realisation of import in 1981 and that in 1982 has shown a decrease of US$ 707.756,91 or 8% (US$ 8.843.043,63 in 1981 down to US $ 8.135.291,72 in 1982).

In the case of import realisation by port of destination in 1984, the value was US $ 4.560.759,06 (foods and drinks(, 3.174.141,81 (raw materials), 14.074.906,10 (capital goods), and US $ 433,96 (other commodities). Then in 1985 the import realisation in this area was US $ 2.697.771,37 for foods and drinks, and US$ 808.790,00 for the capital goods. See Table III-56.

9. Cooperatives

The promotion for cooperatives is aimed at the establishing of cooperatives a firm economic institution and as the major facility for promoting business capability of smallscale businessmen. In line with the above, it is necessary to heighten the awareness of the significance of cooperatives, as well as of the

Cenderawasih, sedangkan di Merauke ada 3 buah perusahaan yang memperoleh APES.

Secara keseluruhan jumlah perusahaan/eksportir umum di daerah ini selama tahun 1982 tercatat sebanyak 41 buah yaitu sebanyak 12 buah perusahaan pemegang APES dan 29 perusahaan pemegang APES. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 39 perusahaan/eksportir, berarti mengalami kenaikan sebanyak 2 perusahaan atau 5,1%. Namun dalam tahun 1982 tercatat pula 8 perusahaan/eksportir yang tidak memperpanjang dan dinyatakan masa laku APE/S-nya sudah habis dimana 5 buah pemegang APE dan 3 buah pemegang APES.

Jumlah importir pemegang TAPPI/S selama tahun 1982 berdasarkan surat ijinnya yang masih berlaku tercatat sebanyak 23 perusahaan (daftar terlampir). Jumlah importir selama tahun 1982 apabila dibandingkan dengan tahun 1981 yang berjumlah 27 perusahaan, mengalami penurunan sebanyak 4 perusahaan (14,81%).

Penurunan ini antara lain disebabkan barang-barang produksi dalam negeri sudah dapat bersaing dengan produksi barang-barang luar negeri. Kesulitan yang dihadapi para importir dalam hal sarana angkutan, dimana kapal-kapal dari luar negeri yang masuk ke Irian Jaya terbatas dan relatip kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di luar Irian Jaya.

Perbandingan realisasi impor selama tahun 1981 dengan tahun 1982 mengalami penurunan sebesar US$ 707.756,91 (8%) yaitu sebesar US$ 8.843.048,63 pada tahun 1981 menjadi US$ 8.135.291,72 dalam tahun 1982.

Sedangkan realisasi impor menurut pelabuhan keadaannya pada tahun 1984 menunjukkan jumlah US$ 4.560.759,06 (makanan/minuman), dan sebesar 3.174.141,81 US$ (barang baku), sebesar US$ 14.074.906,10 untuk barang modal, dan US$ 703.433,96 untuk barang lain-lain. Kemudian dalam tahun 1985 realisasi impor di daerah ini menunjukkan jumlah sebesar US$ 2.697.771,37 untuk jenis makanan/minuman dan sebesar US$ 308.790,00 untuk barang modal. Lihat Tabel III-56.

3. Koperasi

Pembinaan koperasi diarahkan untuk menjadikan koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama sebagai pembinaan kemampuan usaha bagi golongan ekonomi lemah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditingkatkan pula kesadaran berkoperasi dan langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi. Selanjutnya perlu diberi bantuan dan fasilitas guna mengadakan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan tenaga manajemen dan lain-lain.

Sesuai dengan kondisi dan situasi daerah serta keadaan koperasi/KUD di Irian Jaya pada umumnya masih lemah di berbagai segi baik organisasi dan manajemen usaha maupun permodalannya, maka kebijaksanaan pembinaan dan pengembangannya masih memerlukan campur tangan langsung Pemerintah, dengan memberikan bantuan berupa fasilitas/bantuan.

Kebijaksanaan yang dilakukan dalam pengembangan koperasi/KUD di Propinsi Irian Jaya ialah di daerah pedesaan dikembangkan KUD untuk menangani segala aspek kegiatan perekonomian yang ada di pedesaan (multi propose/serba usaha); di daerah perkotaan, disamping dikembangkan koperasi yang multi propose, juga dikembangkan koperasi single propose atau tunggal usaha seperti : Koperasi angkutan, simpan pinjam dan peternakan unggas.

Jumlah koperasi/KUD di Irian Jaya sampai tahun 1985 atau pada tahun kedua Pelita IV ada 386 buah, dengan anggota sebanyak 47.539 orang. Jumlah simpanan sebanyak Rp1.047.901.490,- dan volume usaha mencapai Rp3.299.417.645,-. Volume usaha dan simpanan ini didapat dari berbagai jenis koperasi (KUD dan Golongan Fungsional). Koperasi jenis fungsional ini menempati urutan pertama di daerah ini. KUD menempati urutan kedua. Jenis koperasi yang ada di Irian Jaya ialah koperasi Serba Usaha, koperasi Karyawan Buruh, koperasi si Wanita, konsumsi, koperasi Sekolah, koperasi Simpan Pinjam, dan jasa serta lain-lain. Lihat Tabel III-57.

Di Propinsi Irian Jaya terdapat KUD Model yaitu KUD yang telah berhasil mencapai tingkat kemajuan yang baik sehingga mencapai tingkat klasifikasi "model". Sampai dengan akhir Desember 1982 tercatat sebanyak 30 buah KUD. KUD yang telah mencapai taraf model ini kegiatannya secara aktif telah ikut dalam program pengadaan pangan/stok pangan nasional terutama pada lokasi-lokasi transmigrasi seperti di Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari dan Paniai.

9. Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi

Kegiatan dunia usaha di Propinsi ini umumnya bergerak di bidang usaha perdagangan umum/eceran, perindustrian/kerajinan/perbengkel-

Tabel / *Table III — 56*

REALISASI IMPOR IRIAN JAYA SELAMA TAHUN 1981 S/D SEMESTER I 1983
IMPORT REALISATION IN IRIAN JAYA AREA DURING 1981 TO THE FIRST SEMESTER OF 1983

Nilai dalam : US$
Value in US $

No. Menurut Golongan *By Classification*	Tahun 1981 *Year 1981*	Tahun 1982 *Year 1982*	Semester I Tahun 1983 *First Semester of 1983*
I. GOLONGAN EKONOMI *Economic Classification*			
1. Barang Konsumsi/ *Consumption Goods*	2.478.634,10	1.849.822.08	17.774,20
2. Barang Baku/ *Raw Materials*	271.494,38	509.124,62	36.025,66
3. Barang Modal/ *Capital Goods*	5.822.695,72	5.484.942,05	287.630,33
4. Barang lain-lain/ *Other Commodities*	270.224,43	291.402,97	13.751,15
	8.843.048,63	8.135.291,72	355.241,34
II. GOLONGAN PEMBIAYAAN *Financing Classification*			
1. Devisa Umum/ *General Foreign Exhange*	-	5.310.542,30	-
2. PMA / PMDN *Foreign Investment Domestic Investment Companies*	-	2.824.749,72	-
	—	8.135.291,72	—
III. MENURUT PELABUHAN MASUK *By Port of Departure*			
1. Jayapura	4.083.641,24	3.308.337,50	189.989,27
2. Biak	195.170,19	2.878.376,74	-
3. Manokwari	1.951.012,12	446.245,28	43.137,63
4. Sorong	1.152.398,75	969.465,97	82.143,23
5. Fak-Fak	1.460.826,35	216.919,56	39.971,21
6. Merauke	-	315.946,67	-
	8.843.048,63	8.135.291,72	355.241,34

Sumber : Kanwil Departemen Perdagangan Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Regional Office of the Department of Trade of Irian Jaya Province.

steps to promote and direct the cooperative. Accordingly it will be necessary to provide support and facilities including the managerial personnel and the like.

In conformity with its situation and conditions and with the position of its cooperatives and KUD (Koperasi Unit Desa = Rural Cooperatives) which is still weak both from the organisational and managerial points of view and as well as in relation with financial capital, then the policy for promoting and developing of the cooperatives and the KUD still requires the interference of the Government in the form of support and facilities.

The policy which has been established for developing the cooperatives/the KUD in Irian Jaya Province consists of the effort to develop the KUD in the rural areas in order to manage all economic aspects in those areas (by founding the multipurpose cooperatives), besides to develop both the multi-purpose and single-purpose cooperatives in the urban areas, such as the cooperatives for public transportation, save and loan cooperatives and the cooperatives for poultry farming.

The number of cooperatives/KUD in Irian Jaya up to 1985 or in the second year of the Pelita IV was 886 having members of 47.689. The total of saving was Rp1.047.901.490,- and the volume of business amounted to Rp3.299.417.645,-. These saving and volume of business were accumulated from various cooperatives (KUD and the Functional ones). The functional cooperatives had become the first-ranked cooperatives in Irian, while KUD reached the second rank. The kinds of cooperatives in Irian Jaya consist of Koperasi Serba Usaha (Multi-Purpose Cooperatives), Koperasi Karyawan Buruh (Cooperatives for Labourers), Koperasi Wanita (Women's Cooperatives), Koperasi Simpan-Pinjam (Save and Loan Cooperatives), Koperasi Jasa (Cooperatives for Services) and some others. See Table III-57.

There are the so-called KUD Models in Irian Jaya Province. They are the units which have progressed so well that they may be included in the rank of "model". Up to the last of December 1982 there were 30 KUD. The socalled KUD Models had actively participated in supplying foods and the national food-stock especially for the transmigration locations such as in Jayapura, Merauke, Sorong, Manokwari and Paniai.

Tabel / *Table III — 57*

BANYAKNYA KOPERASI, ANGGOTA, SIMPANAN DAN VOLUME USAHA MENURUT JENIS KOPERASI TAHUN 1985
NUMBER OF COOPERATIVE, MEMBER, AND THE TOTAL OF SAVING AND THE VOLUME OF BUSINESS BY THE KIND OF THE COOPERATIVES, 1985

No. Jenis Koperasi / *Kind of Cooperative*	Jumlah / *Number*: Koperasi / *Cooperatives*	Anggota / *Member*	Simpanan / *Saving*	Volume Usaha (Rp) / *Volume of Business (Rp)*
1 2	3	4	5	6
1. KUD	100 x	17.123	85.933.125	339.640.700
2. Gol. Fungsional/ *Functional Cooperatives*	171 xx	19.050	644.731.500	1.934.194.500
3. Serba Usaha/*Multi Purpose*	23	1.125	45.750.250	137.250.750
4. Karyawan Buruh/ *Cooperatives for Labourers*	28	2.507	68.675.800	206.027.400
5. Wanita/ *Women's Cooperatives*	10	771	2.905.650	8.716.950
6. Konsumsi/ *Cooperatives for Consumption*	8	194	4.850.000	14.550.000
7. Sekolah/ *School's Cooperatives*	16	3.468	10.030.165	15.675.500
8. Simpan Pinjam dan Jasa/ *Save & Loan and Services Cooperatives*	3	95	2.375.000	11.875.000
9. Lain-lain/*Others*	27	3.306	182.650.000	631.486.845
Jumlah / *Total*	386	47.639	1.047.901.490	3.299.417.645
1984	325	66.757	584.286.000	2.385.218.000
1983	275	34.488	333.853.163	2.467.278.062
1982	216	25.110	270.929.905	1.835.172.594

Sumber : Kanwil Departemen Koperasi Propinsi Irian Jaya.
Source : Regional Office of the Department of Co-operatives of Irian Jaya Province.

an, perkoperasian, jasa, angkutan, pemborongan dan lain-lain tersebar di seluruh daerah. Adapun organisasi-organisasi pengusaha yang terdapat di sini ialah Kadin, yang menampung asosiasi-asosiasi para pengusaha (HIPMI, KUPNI, HIPLI dan lain-lain) dan para pengusaha perorangan. Organisasi ini juga membantu para anggota yang memerlukan di bidang organisasi/manajemen sesuai dengan kemampuan yang ada.

Kegiatan dunia usaha di daerah ini umumnya terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten, sedangkan di daerah Kecamatan/pedalaman masih terbatas. Hal ini disebabkan karena kegiatan perekonomian di daerah-daerah pedalaman masih rendah, dan belum merangsang bagi perkembangan dunia usaha.

Lembaga-lembaga keuangan berupa Bank-Bank Pemerintah Daerah terdapat di seluruh Ibukota Kabupaten. Perkembangan perkreditan sejak awal Pelita III nampak cukup besar yaitu Rp7.925.590.000,- meningkat menjadi Rp28.928.004.000,- pada akhir Pelita III yang mencakup sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, angkutan, jasa-jasa dan lain-lain. Lihat Tabel III-58.

Kantor Wilayah Perdagangan Irian Jaya selama Pelita II dan III telah menerbitkan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) untuk berbagai usaha perdagangan dan jasa. Lihat Tabel III-59.

Mengenai komposisi pemilikan SIUP yang telah diterbitkan dalam Pelita II (pengusaha Golongan Ekonomi Lemah sebanyak 52,48%, pengusaha Golongan Ekonomi Kuat sebanyak 47,52%). Kemudian dalam Pelita III jumlah tersebut meningkat menjadi 64,71% untuk pengusaha Golongan Ekonomi Lemah dan sebanyak 35,29% untuk pengusaha Golongan Ekonomi Kuat.

Apabila dilihat dari bidang usaha perkoperasian, jumlah Badan Usaha Koperasi/KUD adalah sebagai berikut : untuk kelas A (baik) sebanyak 20 buah, kelas 3 (sedang) sebanyak 119 buah, kelas C (kurang) ada 60 buah, sedangkan yang belum diklasifikasi sebanyak 76 buah. Dari jumlah tersebut sebanyak 270 buah termasuk dalam tingkat Koperasi/KUD Primer dan 5 (lima) buah adalah termasuk dalam tingkat Koperasi Pusat.

Disamping itu kegiatan dunia usaha yang bergerak melalui pasar yang dibangun dari dana INPRES hingga Pelita III tercatat sebanyak 31 buah, yang terdiri dari 300 buah Kios dan sebanyak 2.782 buah Los. Untuk meningkatkan ketrampilan pedagang/pengusaha Golongan Ekonomi Lemah, telah dilaksanakan pembinaan melalui penataran/konsultasi dan penyuluhan di bidang organisasi dan manajemen. Hingga Pelita III pedagang/pengusaha yang telah diberi penataran/konsultasi dan penyuluhan adalah sebagai berikut : penataran diberikan kepada 303 pedagang/pengusaha; konsultasi diberikan terhadap 284 pedagang/pengusaha; sedangkan penyuluhan diberikan kepada 401 pedagang/pengusaha.

9. The Development of Business and Investment

The business activities in this province include general merchandising/retail-selling, industry/craftmanship/repairs, cooperatives, services, transportation, contracting and others spreading over the whole area. The only organisation in this province of which the businessmen are members is KADIN (Kamar Dagang Indonesia = Indonesian Chamber of Commerce), which also covers the existing associations of businessmen such as the HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia = Young Businessmen Association of Indonesia), KUPNI (Kumpulan Pengusaha Nasional Indonesia = National Businessmen Union), HIPLI (Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia = Union of Puny Entrepreneurs of Indonesia) and the like, as well as covers the individual businessmen. Besides, this organisation also provides its members with organisational/managerial assistances according to its capacities.

The activities are generally concentrated in the district capitals, while the business activities in sub-districts moreover in remote areas are still limited. It is because the economic profile in the remote areas is low, so that it does not as yet stimulate the development of business.

Financial institutions which take the form of the Provincial Government's banks are found in all capitals of districts. The growth of loan since the beginning of Pelita III was encouraging. It was Rp7.925.590.000,- which then grew up to Rp28.928.004.000,- during the last period of Pelita III which covered the sectors of agriculture, industry, construction, trade, transportation, services, and some others. See Table III-58.

Tabel / *Table III — 58*

PERKEMBANGAN JUMLAH KREDIT TAHUN 1979 S/D 1983
THE GROWTH OF CREDIT LOAN 1979 — 1983

Sektor / *Sector*	1979	1980	1981	1982	1983
1. Pertanian/*Agriculture*	261.082	628.646	2.155.722	790.221	801.747
2. Industri/*Industry*	243.674	345.504	677.496	1.026.091	926.256
3. Konstruksi/*Construction*	-	3.337.530	8.071.777	9.098.729	8.396.830
4. Perdagangan/*Trade*	1.888.089	3.145.516	5.885.679	8.485.501	10.072.735
5. Angkutan/*Transportation*	-	685.466	1.290.189	1.440.082	1.250.949
6. Jasa-jasa/*Services*	-	1.119.626	1.249.524	1.852.787	2.291.986
7. Lain-lain/*Others*	5.532.745	1.341.634	3.331.918	4.339.436	5.187.501
Jumlah / *Total*	7.925.590	10.063.922	22.661.955	27.032.847	28.928.004

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of Regional Repelita IV of Irian Jaya Province.

The Regional Office of the Department of Trade in Irian Jaya during the Pelita II and Pelita III periods had issued SIUPs (Surat Ijin Usaha Perdagangan = Trade operating permit) for various trading companies and service bureaus. See Table III-59.

Tabel / *Table III — 59*

	Pedagang Kecil / *Small Scale Trader*	Pedagang Menengah / *Medium Trader*	Pedagang Besar / *Whole-saler*	Jumlah / *Number*
Pelita II	3.935 buah	2.890 buah	325 buah	7.150 buah
Pelita III	4.018 buah	3.253 buah	360 buah	7.631 buah
Jumlah / *Total*	8.003 buah	6.143 buah	685 buah	14.781 buah

Sumber : Buku Repelita IV Propinsi Dati I Irian Jaya.
Source : Book of Regional Repelita IV of Irian Jaya Province.

In the case of the SIUP holders, the composition during Pelita II was as follows : Small-scale businessmen 52,48% and large-scale businessmen 47,52%. Then by the Pelita III these numbers went up to 64,71 % (smallscale businessmen) and 35,29 % (large-scale businessmen).

As with the cooperatives the number of Badan Usaha Koperasi (Cooperatives Management Board) and KUD was as follows : Classification A (good) consisted of 20, classification B (fair) 119, and classification C (poor) 60 units. While the other 76 units were not yet classified. From the above numbers 270 were classified as the Primary Cooperatives/KUD and 5 as the Central Cooperatives.

Besides, the trading activities in Irian Jaya are also done in the market-places which are built by using the INPRES (Instruksi Presiden = Instruction of the President) Fund.
Up to the Pelita III, there had been 31 market-places built by using the INPRES Fund consisting of 300 kiosks and 2.782 shelters. In order to improve the skills of the small-scale businessmen/traders, some promotions had been

Untuk mengatasi tingginya harga di daerah-daerah pedalaman/terisolir akibat mahalnya biaya angkutan, maka dalam Pelita III telah diberikan bantuan/subsidi biaya angkutan sebesar 50% untuk seluruh daerah Kabupaten kecuali Kabupaten Merauke. Tahun 1982/1983 **jumlah barang yang diangkut seberat 441.049 Kg, dan jumlah subsidi** yang diberikan sebesar Rp104.946.409,25,-. Tahun 1983/1984 jumlah barang yang diangkut sebesar 1.213.243 Kg, dan jumlah subsidi yang diberikan sebesar Rp313.509.747,50,-/Tahun 1984/1985 : sampai dengan triwulan ke II jumlah barang yang diangkut seberat 1.086.211 Kg, dan jumlah subsidi yang diberikan Rp255.491.185,00,-.

Kebijaksanaan penanaman modal di Propinsi Dati I Irian Jaya hingga Pelita IV dibagi dalam 4 (empat) wilayah pembangunan, sebagai berikut: Wilayah Pembangunan I meliputi Kabupaten Jayapura dan Jayawijaya; Wilayah Pembangunan II meliputi Kabupaten Biak Numfor, Manokwari, Paniai dan Yapen Waropen; Wilayah Pembangunan III meliputi **Kabupaten Sorong dan Fak-Fak; dan Wilayah Pembangunan IV meliputi Kabupaten Merauke**

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi maka peningkatan penanaman modal mutlak perlu yang dilaksanakan oleh sektor Pemerintah maupun Swasta. Penyebaran penanaman modal secara geografis telah dilakukan Pemerintah yang disesuaikan dengan potensi sumber kekayaan alam yang terdapat di berbagai daerah di wilayah Irian Jaya. Pengarahan penanaman modal di berbagai sektor/bidang usaha sangat penting demi terciptanya pemerataan seperti kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Kegiatan investasi pembangunan dari sektor swasta (PMDN dan PMA) selama Pelita III di Propinsi Irian Jaya yang disesuaikan dengan harga konstan tahun 1983 menunjukkan meliputi 137 pengusaha yang bergerak di sektor pertambangan dan penggalian serta non pertambangan dan penggalian dengan jumlah realisasi investasi sebesar Rp875.707.727.000,- terdiri dari Rp363.308.435.000,- (pertambangan dan penggalian), dan sebesar Rp740.957.291.000,- (sektor non pertambangan dan penggalian).

Perkembangan penanaman modal dalam negeri di Propinsi Irian Jaya pada tahun 1976 menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang ini cuma 1 perusahaan dengan rencana investasi sebesar Rp4.435.000.000,- terealisir sebesar Rp4.701.500.000,- dan rencana menyerap tenaga kerja sebanyak 250 ternyata meningkat terealisir mencapai 275 orang tenaga kerja. Kemudian pada tahun 1977 rencana investasi sebesar Rp4.735.000.000,- terealisir sebesar Rp5.631.500.000,- dan rencana menyerap tenaga kerja sebanyak 350 orang ternyata terealisir melebihi rencana yaitu sebanyak 355 orang dengan jumlah perusahaan sebanyak 355 orang dengan jumlah perusahaan sebanyak 2 buah.

Hingga tahun 1985 perkembangan investasi perusahaan PMDN menggambarkan dari rencana investasi sebanyak Rp287.470.862.000.000,- realiasinya mencapai Rp90.356.020.000.000,- menyerap tenaga kerja sebanyak 6.036 orang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.519 dan tenaga asing sebanyak 517 orang meliputi 35 perusahaan. Lihat Tabel III-60.

Kegiatan Penanaman Modal Asing dalam tahun 1976 ada 8 perusahaan yang rencana investasinya sebesar US$ 137.691.629 atau Rp137.691.629.000,- dan realisasinya mencapai US$ 143.855.223

launched in the form of up-grading courses, counselling, and guidances on organisation and management. Until the Pelita III, the promotions had covered the following: up-grading courses for 303 businessmen/traders; counselling for 284 businessmen/traders; while guidances had been given to 401 businessmen/traders.

In order to cope with the problem of high prices in the remote/isolated areas due to the expensive cost of transportation, subsidy or financial support had been provided to cover transportation cost by 50 % for the whole districts except the Merauke District. During 1982/1983, the amount of goods which were transported was 441.049 kgs, and the amount of subsidy for the transportation cost was Rp104.946.409,25. During 1983/1984 the amount of goods transported were 1.213.243 kgs and the amount of subsidy was Rp313.509.747,50 while during 1984/1985, up to the Second Quarter of the above period the amount of goods transported were 1.086.211 kgs and the subsidy was Rp255.491.185,00.

The policy on investment in Irian Jaya Province during Pelita IV had divided the area into 4 (four) investment areas called the Development Areas as follows: Development Area I covering Jayapura and Jayawijaya Districts; Development Area II covering Biak Numfor, Manokwari, Paniai and Yapen Waropen Districts; Development Area III covering Sorong and Fak-Fak Districts; and Development Area IV which covers the District of Merauke.

In the effort to heighten the rate of economy, the rate of investment should necessarily be increased both by the Government and the private. In this case, the Government had distributed the investment geographically in accordance with the potentials of the natural resources existing in the various areas in Irian Jaya Province. Directions for investment in various sectors are of importance in order to create the equitable job opportunities, economic growth, education opportunities and the like.

The investment for development by the private (the PMDN and the PMA) during the Pelita III in Irian Jaya Province in accordance with constant price of 1983 had covered 137 businessmen activating in the sectors of mining and exploitation and in those of non mining-and-exploitation, and the value of the investment was up to Rp875.707.727.000,- composed from Rp363.398.435.000,- (mining and exploitation) and Rp740.957.291.000,- (non mining-and-exploitation).

Meanwhile, the growth of domestic investment in Irian Jaya Province during 1976 indicates that during that period there was only one domestic company to invest its capital in this area with the investment value planned to amount to Rp4.435.000.000,- and realised by Rp4.701.500.000,- and which was plannet to employ 250 but in realisation had employed 275 personnel. Then, in 1977 the plan of investment with value of Rp4.735.000.000,- had been realised by Rp5.631.500.000,- and the plan to employ 350 had in realisation employed 355 personnel in two companies.

Up to 1985 the growth of domestic investment had been as follows : The investment plan with value of Rp287.470.862.000.000,- had been implemented at Rp90.356.020.000.000,- and by absorbing 6.036 personnel which had consisted of 5.519 Indonesians and 517 foreigners in 35 companies. See Table III-60.

The activities of foreign investment in 1976 might be described as follows: There were 8 companies which planned to invest their capitals having the total value of US $ 137,691,629 or equivalent to Rp137.691.629.000,- which in realisation had invested the capitals which value was totally US $ 143,

Tabel / *Table III — 60*

PERKEMBANGAN INVESTASI PERUSAHAAN PMDN DAERAH TK. I
IRIAN JAYA TAHUN 1978 - 1985
THE GROWTH OF DOMESTIC INVESTMENT IN IRIAN JAYA PROVINCE, 1978 - 1985

Dalam Rupiah *In Rupiah*

No	Tahun *Year*	Banyaknya Perusahaan *Number of Companies*	Investasi *Investment*		Tenaga Kerja *Personnel*		
			Rencana *Plan*	Realisasi *Realisation IA*	Indonesia *On Foreign*	Asing *Total*	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1985	35	287.470.862.000	90.356.020.000	5.519	517	6.036
2.	1984	23	291.440.201.000	66.546.297.000	-	-	3.345
3.	1983	17	215.662.245.000	64.025.197.000	-	-	2.819
4.	1982	17	201.965.311.000	31.334.970.000	-	-	2.705
5.	1981	16	194.422.720.000	185.252.216.000	-	-	2.375
6.	1980	10	57.726.250.000	46.612.926.000	-	-	2.125
7.	1979	5	21.157.200.000	11.202.133.000	-	-	1.950
8.	1978	7	21.157.200.000	11.202.133.000	-	-	1.750

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Propinsi Irian Jaya.
Source : BKPMD (Regional Investment Coordinating Board) The Province of Irian Jaya.

(Rp143.844.233.000,-), dan rencana tenaga kerja sebanyak 1509 orang ternyata realisasinya 1.495 orang. Kemudian pada akhir Pelita III (1983) ada 15 buah perusahaan dengan rencana investasi sebesar US$ 244.282.000 atau Rp244.282.000.000,- realisasinya sebesar US$ 197.920.000 atau Rp197.920.000.000,-, yang rencana menyerap tenaga kerja sebanyak 5815 orang ternyata realisasinya melebihi rencana yaitu mencapai 5.741 orang. Hingga tahun 1985 keadaan perkembangan investasi perusahaan PMA ada sebanyak 12 perusahaan yang rencana investasi sebesar US$ 314.238.240 realisasinya agak jauh melebihi rencana yaitu mencapai US$ 505.927.768 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 4.332 orang. Lihat Tabel III-61.

Tabel / *Table III — 61*

PERKEMBANGAN INVESTASI PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING (PMA) YANG DISETUJUI OLEH PEMERINTAH TAHUN 1978 — 1985
THE GROWTH OF FOREIGN INVESTMENT COMPANIES (PMA) BY THE GOVERNMENT'S APPROVAL, 1978 — 1985

US

No.	Tahun *Year*	Banyaknya Perusahaan *Number of Company*	Investasi *Investment* Rencana *Plan*	Realisasi *Realisation*	Tenaga Kerja *Personnel* Indonesia *Indonesia*	Asing *Foreign*	Jumlah *Total*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1985	12	314.238.240	505.927.768	-	-	4.332
2.	1984	15	293.362.000	417.420.000	-	-	6.774
3.	1983	14	263.922.576	419.585.472	-	-	5.741
4.	1982	14	175.184.100	114.797.491	-	-	5.580
5.	1981	14	210.185.950	212.096.615	-	-	5.475
6.	1980	15	192.781.550	182.064.665	-	-	5.350
7.	1979	14	192.280.050	109.278.526	-	-	4.785
8.	1978	11	181.899.900	105.477.596	-	-	2.895

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985.
Source : Irian Jaya In Figure 1985.

10. Tenaga Kerja

Keadaan hingga akhir Pelita III menunjukkan jumlah angkatan kerja sekitar 440.102 orang, dan 85% diantaranya tinggal di pedesaan.

Struktur usaha penduduk terkonsentrasi pada usia muda yang memerlukan fasilitas pendidikan, latihan dan lapangan kerja. Sedangkan pertambahan angkatan kerja yang memasuki lapangan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, sementara kesempatan kerja yang ada tidak diisi oleh tenaga kerja yang tersedia.

Di pihak lain keadaan tingkat sosial budaya masyarakat masih dalam taraf permulaan adat istiadatnya mengikat dalam konsumtif, dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang masih rendah. Disamping itu kondisi alam yang cukup berat serta keadaan pemukiman terpencar menyebabkan mobilitas tenaga kerja untuk usaha-usaha penempatannya kurang memenuhi harapan.

Jumlah penduduk di Propinsi Irian Jaya menurut sensus penduduk tahun 1980 tercatat 1.173.875 orang yang tersebar di Dati II Jayapura: 151.308 orang, Dati II Jayawijaya : 257.291 orang, Dati II Merauke : 172.662 orang, Dati II Fak-Fak : 63.903 orang, Dati II Sorong : 134.833 orang, Dati II Manokwari : 84.757 orang, Dati II Biak Numfor : 71.020 orang, Dati II Paniai : 117.619 orang, Dati II Yapen Waropen : 59.982 orang. Dengan luas wilayah Irian Jaya sebesar 410.660 Km2, maka kepadatan penduduk adalah : 2,8 orang per Km2. Penduduk yang berumur 10 tahun keatas sebanyak 755.459 orang, sedangkan angkatan kerja sebanyak 364.075 orang. Jumlah orang yang bekerja ialah sebanyak 354.434 orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 6.645 orang (1,82%).

Pada tahun 1980, jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja Propinsi Irian Jaya adalah 10.778 orang. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,63% dalam kurun waktu 1971 sampai dengan 1980 membawa pengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja di Propinsi Irian Jaya merupakan angkatan kerja yang berumur muda yang belum memiliki ketrampilan, oleh karena baru pertama kali dalam pasar tenaga kerja. Lihat Tabel III-62 dan III-63.

Keberhasilan yang dicapai dalam pembinaan ketenagakerjaan didukung oleh dedikasi para pelaksana, koordinasi yang baik, tersedianya dana dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor-faktor tersebut tidak tersedia dengan cukup, dan karyawan masih kurang baik kualitas

855,223 equivalent to Rp143.844.233.000,- The plan to absorb 1509 personnel had been implemented by absorbing only 1495 personnel. Then, during the last period of the Pelita III (1983) there were 15 companies planning to invest their capitals with a total value of US $ 244,282,000 being equivalent to Rp244.282.000.000,- and implementing at totally US $ 197,920,000 equivalent to Rp197.920.000.000,- and which planned to absorb 5315 but in realisation had absorbed up to 5741 personnel. Until 1985 the situation of foreign investment was as described here: There were 12 companies having the plans to invest capitals totally US $ 314,238,240 in value and implementing at higher total value of capitals that was US $ 505,927,763 and which and absorbed as many as 4332 personnel. See Table III-61.

10. The Manpower

The situation of manpower up to the end of Pelita III was as follows : The number of manpower was about 440.102 and 85 % of which consisted of those living in the rural areas.

The structure of population is predominated by people of the young age who need the facilities for education and training besides job opportunities. Meanwhile, the increase in the number of manpower ready to enter the job market is not in line with the number of job opportunity, and the existing job opportunities have been taken not by the available manpower.

On the other hand, the people have only begun to enter a sociocultural environment, their customary laws are strict, and the level of education and skill is still low. Moreover, the hard natural conditions and the scattered living areas have caused the mobility of manpower to face the handicap. Accordingly, the efforts to put the manpower in function are still far from what is expected.

The number of population in Irian Jaya by the cencus of 1980 was 1.178.875 living spreadingly over the whole province with the specification as follows : 151.808 in Jayapura, 257.291 in Jayawijaya, 172.662 in Merauke, 68.808 in Fak-Fak, 134.833 in Sorong, 84.757 in Manokwari, 71.029 in Biak Numfor, 117.619 in Paniai, and 59.982 in Yapen Waropen.

Having the width of 410.660 square kilometres, Irian Jaya's density of population was 2,8 per square kilometres. The number of population of above 10 years old was 755.459, while the number of manpower was 364.075 and that of working people was 354.434, and that of people looking for jobs was 6.645 or 1,81 %.

By the cencus of 1980, the number of people looking for jobs as listed in te Subsidiary of the Department of Manpower in Irian Jaya Province was 10.778.

In line with the rate of the population growth of 2,63 % during the period of 1977 to 1980, the number of manpower had also increased.

The manpower in Irian Jaya consists of the young people who are not yet skilled because they have only just entered the job market. See Table III-62 and III-63.

Tabel / *Table III — 62*

PENDAFTARAN/PENEMPATAN/PERMINTAAN TENAGA KERJA DI IRIAN JAYA (PERIODE 1974 S/D 1983)
THE APPLICATION/STATIONING/REQUIRING OF MANPOWER IN IRIAN JAYA, 1974 — 1983

Tahun *Year*	Pendaftaran Pencari Kerja *Application from Job Seeker*	Penempatan *Stationing*	Permintaan Tenaga Kerja *Requiring of Manpower*
1974	14.150	2.870	3.097
1975	13.579	3.600	3.897
1976	10.046	1.973	2.692
1977	13.800	3.477	3.679
1978	12.671	3.830	4.355
1979	14.666	3.092	3.887
1980	10.778	3.549	4.702
1981	11.958	2.294	4.032
1982	12.115	3.651	4.184
1983 *)	8.769	1.379	1.507

Sumber : Departemen Tenaga Kerja Irian Jaya
Source : Regional Office of the Department of Manpower of Irian Jaya Province.
*) s/d medio 1983 / *Middle of 1983.*

The achievement in promoting the manpower should be owing to the dedication of the personnel doing the promotion, to the sound coordination and be supported by the people's participation and by the availability of finance. Those supporting factors are not sufficiently available in Irian Jaya so that it is rather hard to find qualified employees.

The other handicap to the achievement in manpower promotion is that the apparatus of the Department of Manpower only exist in the district-levelled areas so that they cannot reach the manpower problems in the areas of subdistrict level located in the remote places.

Tabel / *Table III — 63*

JUMLAH PERUSAHAAN DAN JUMLAH BURUH MENURUT KABUPATEN TAHUN 1979/1980 S/D 1982/1983 DI PROPINSI IRIAN JAYA
NUMBER OF EMPLOYEE BY DISTRICT IN IRIAN JAYA 1979/1980 - 1982/1983

No	Kabupaten *District*	1979/1980		1980/1981		1981/1982		1982/1983	
		Perusahan *Company*	Buruh *Employee*	Perusahaan *Company*	Buruh *Employee*	Perusahaan *Company*	Buruh *Employee*	Perusahaan *Company*	Buruh *Employee*
1.	Jayapura	74	1.166	89	1.952	168	3.109	183	3.771
2.	Manokwari	43	1.272	33	1.206	40	1.579	101	2.827
3.	Yapen Waropen	11	186	17	397	33	321	38	318
4.	Biak Numfor	30	2.481	49	3.336	77	3.118	106	3.533
5.	Sorong	55	4.345	108	7.041	132	6.120	120	7.170
6.	Fak-Fak	11	1.041	46	2.771	62	1.066	64	831
7.	Merauke	42	642	35	930	63	2.547	61	2.423
8.	Paniai	24	128	22	298	39	1.384	70	1.868
9.	Jayawijaya	7	31	9	77	45	248	49	248
	Jumlah / *Total*	297	11.292	408	18.008	663	19.492	795	22.989

Sumber data : Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Irian Jaya
Resource of Data : Regional Office of the Department of Manpower of Irian Jaya Province.

maupun kuantitas, serta fasilitas prasarana dan sarana yang belum memadai. Hambatan lain ialah karena keberadaan aparat Departemen Tenaga Kerja hanya ada sampai di Dati II maka keadaan di daerah-daerah kecamatan di pedalaman tidak terjangkau.

Selanjutnya pengerahan tenaga kerja di Irian Jaya dilaksanakan melalui (a) Pengerahan tenaga kerja muda terdidik ke desa-desa melalui TKS-BUTSI; (b) Pengerahan tenaga kerja melalui sistem Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Jumlah TKS-BUTSI yang ditugaskan di Irian Jaya adalah TKS-BUTSI tahun ketiga yaitu telah dua tahun bertugas di daerah lain dan di Irian Jaya merupakan proses penempatan. Setiap tahun jumlah TKS-BUTSI mengalami kenaikan yaitu dari 45 orang TKS pada tahun 1974/1975 menjadi 191 orang pada tahun 1983/1984. Jumlah seluruh TKS-BUTSI yang bertugas di Propinsi Irian Jaya sebanyak 583 orang, tersebar di seluruh Kabupaten di Irian Jaya. Dari jumlah tersebut terdiri dari 467 orang yang TKS yang bertugas di daerah pedesaan dan Instansi Pemerintah (umum) dan 85 orang yang bertugas di daerah transmigrasi, dan 31 orang yang bertugas di 31 Kecamatan UDKP.

Pengarahan tenaga kerja melalui Sistem Antar Kerja ini dilaksanakan oleh karena terjadi kekurangan tenaga di lokasi proyek maupun di Irian Jaya. Jumlah tenaga kerja yang dikerahkan melalui sistem AKAN sebanyak 19.715 orang (selama lima tahun). Jumlah pengerahan tenaga kerja seluruhnya sebanyak 20.685 orang. Penyelenggaraan kegiatan secara padat karya gaya baru (PKGB) di Irian Jaya diarahkan untuk pembuatan jalan, saluran irigasi dan drainase.

Dalam usaha untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas sumber daya, khususnya manusia, maka telah diselenggarakan program-program latihan. Penyelenggaraan latihan yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja sejak Pelita III sebanyak 4.767 orang terdiri dari latihan Institusional BLK (Balai Latihan Kerja) sebanyak 2.176 orang (45%), MTU (Mobile Training Unit) sebanyak 1,930 orang (41%) dan kerja sama dengan instansi lain sebanyak 661 orang (13,8%). Latihan ketrampilan melalui MTU dilaksanakan hampir semua Kabupaten yang dimulai sejak tahun 1980/1981. Kabupaten yang belum pernah diselenggarakan latihan untuk MTU yaitu Fak-Fak dan Sorong akan dilaksanakan tahun 1983/1984. Kegiatan MTU untuk Kabupaten-Kabupaten dilaksanakan oleh BLK Jayapura dan BLK Manokwari. Lihat Tabel III-64.

11. Transmigrasi

Program Transmigrasi di Irian Jaya merupakan salah satu sektor yang diutamakan sesuai dengan kondisi daerah dan penduduk.

Irian Jaya yang mempunyai luas 410.660 Km2 atau 20% dari luas seluruh Indonesia, hanya mempunyai penduduk 1.173.875 jiwa (Sensus Penduduk tahun 1980). Kepadatan penduduk masih rendah sekali (3 jiwa per Km2). Pemukiman penduduk Irian Jaya tersebar di seluruh daerah, dengan konsentrasi besar di daerah antara pegunungan Jayawijaya dan Paniai.

Kelangkaan jumlah penduduk dibanding dengan luas wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan secara ekonomis, menyebabkan pembangunan daerah ini kurang dapat berkembang. Oleh karena itu semenjak Irian Jaya kembali ke Indonesia, hanya dua kemungkinan yang dapat ditempuh untuk memajukan daerah ini. Pertama ialah dengan mendidik putra-putra asli daerah baik dalam bidang ilmu

The deployment of manpower in Irian Jaya is carried out by (a) TKS-BUTSI for the skilled young-aged manpower, (b) The system called AKAD (Antar Kerja Antar Lokal = Inter-Region Employment Dispersion) and the AKAN (Antar Kerja Antar Negara = Inter-Nation Employment Dispersion).

The persons employed in Irian Jaya by the TKS-BUTSI were of the third programme of TKS-BUTSI, and they had been previously employed for two years in other areas. Thus, their employment in Irian Jaya was regarded as the stationing.
The number of persons employed by the TKS-BUTSI increase each year. In the period of 1974/1975 increased from 45 to 191 in that of 1983/1984. The number of the TKS-BUTSI personnel in the Province of Irian Jaya is 437 consisting of those working in the rural areas and at Government's institutions (Public institutions), and the other 85 working in the transmigration locations, besides the remaining 31 working at the 31 units of sub-district UDKP (Development Work Are Unit). —

The deployment of manpower by the system of exchange was due to the lack of manpower both in the project location and in Irian Jaya. The number of manpower employed by the system of AKAN was 19.715 (during the period of five years). While the total number was 20.685. The activities which were done by the programme called PKGB (Padat Karya Gaya Baru = New Labour-Intensive Projects) in Irian Jaya were composed from making roads, irrigation canals and drainage.

In the effort to recover and to improve the quality of resources, especially the human resources, several training programmes had been carried out. The training programmes held by the Department of Manpower since the Pelita III had covered 4.767 persons consisting of 2.176 (45 %) trained in the BLK (Balai Latihan Kerja = Skill Training Institute), 1.230 (41 %) trained in the MTU (Mobile Training Unit) and 661 (13,8 %) in other institutes.
The training of skill by the MTU was held in almost all districts beginning from 1980/1981, except in two districts, they were Fak-Fak and Sorong where the training was to be carried out by 1983/1984. The programme of training by means of the MTU in the districts had been implemented by the BLK of Jayapura and that of Manokwari. *See Table III-64.*

11. Transmigration

The programme of Transmigration in Irian Jaya is one of the sectors which are of priority in accordance with the conditions and the population of the area.

Having the width of 410.660 km2 or 20 % of the whole widht of Indonesia, Irian Jaya is populated by only 1.173.875 people (by the population cencus of 1980). The rate of the population density is very low (3 inhabitants per km2). The areas of settlement in Irian Jaya are scattered in the whole area, many of which are concentrated in the mountainous parts between Jayawijaya and Paniai.

The low rate of the population density compared to the width of the area which is very potential to be economically developed has become the reason whi the provincial development of Irian Jaya has not obtained much progress. That is why, since the taking-over of the administration of Irian Jaya by the Government of Indonesia, there have been only two possibilities available for developing this area. Firstly, by educating the indigenous people in knowledges and as well as in any skill required in Irian Jaya. Secondly, by the programme of transmigration. Although the first alternative ha been taken and implemented and have been developed as well, by estimation and in realisation this on will take a fairly long time. Threfore, the second alternative that is the transmigration programme by which the ready-to-work inhabitants of other areas are migrated to Irian Jaya, has been more desirable.

Tabel / *Table III — 64*

JUMLAH SISWA YANG DILATIH MELALUI INSTITUSIONAL, MTU DAN KERJA SAMA SELAMA PELITA III (1979/1980 S/D 1983/1984) DI PROPINSI IRIAN JAYA

NUMBER OF PARTICIPANT IN TRAINING COURSES BY INSTITUTE, MTU AND COOPERATION PROGRAMME DURING PELITA III, 1979/1980 - 1983/1984, IRIAN JAYA

No	Kejuruan / *Vocation*	Institusional / *Institute* 79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	MTU 79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	Program Kerja Sama / *Cooperation Programme* 79/80	80/81	81/82	82/83	83/84	Jumlah / *Total*
1.	Montir Mobil/Pengemudi/ *Car Repair & Driving*	20	20	39	69	20	-	-	-	140	-	18	56	20	23	20	445
2.	Alat berat/diesel/ *Heavy Equipment & Diesel Engine Handlings*	19	16	59	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
3.	Listrik/*Electricity*	19	17	33	46	20	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	235
4.	Radio/*Radio Repair*	-	17	20	22	-	-	-	40	100	-	-	144	66	12	-	421
5.	Mesin/*Machine Repair*	18	15	31	38	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
6.	Las/*Welding*	17	20	31	58	20	-	16	40	80	-	-	-	-	-	-	282
7.	Bangunan batu/kayu/ *Masonry & Carpentry*	14	51	46	230	40	-	64	60	160	-	-	-	-	-	-	665
8.	Pertukangan/*Craftman-ship*	31	16	30	56	20	-	9	60	220	-	-	-	-	30	-	472
9.	Mengetik/*Typing*	210	162	165	200	40	-	-	-	-	-	20	122	25	-	-	944
10.	Menjahit/*Sewing*	-	-	20	40	25	-	50	140	161	-	-	-	-	5	-	141
11.	Memasak/*Cooking*	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34
12.	Pertanian/*Agricultural*	-	-	-	-	-	-	-16	-	80	-	-	-	-	-	-	96
13.	Perkebunan/*Forestry*	-	-	-	-	-	-	-	40	100	-	-	-	-	-	-	140
14.	Peternakan/*Cattle Farming*	-	-	-	-	-	-	-	40	100	-	-	-	-	-	-	140
15.	Perikanan/*Fishery*	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40	-	80
16.	Suspatda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	40	-	100
	Jumlah / *Total*	348	334	474	815	205	-	189	420	1.281	-	38	322	171	150	20	4.767

Sumber data : Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Irian Jaya.
Source of Data : Regional Office of the Department of Manpower of Irian Jaya Province.

pengetahuan, maupun dalam berbagai jenis ketrampilan yang dibutuhkan di Irian Jaya. Kedua adalah dengan program transmigrasi atau migran-migran dari daerah lain. Sekalipun alternatif pertama terus dikembangkan, akan tetapi berdasarkan perhitungan dan kenyataan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga alternatif kedua yaitu mendatangkan tenaga-tenaga yang siap pakai melalui program transmigrasi.

Dilihat dari segi periode pengiriman transmigran ke Irian Jaya dapat dibagi dua. Pertama, transmigran Pra Pelita dan Kedua, transmigran yang dikirim selama pelaksanaan Pelita. Transmigran Pra Pelita jumlahnya sedikit dengan lokasi yang terbatas. Sedangkan selama Pelita, dikirim secara besar-besaran karena telah diprogramkan secara sistematis dengan dukungan dana secara besar-besaran. Oleh karena itu lokasinyapun tersebar pula, dengan persiapan yang lebih baik.

Transmigran pertama yang dikirim tahun 1964, yaitu dua tahun setelah Irian Jaya diserahkan UNTEA ke pangkuan Republik Indonesia tahun 1962. Jumlahnya mencapai 49 KK dengan jiwa sebanyak 94 orang. Lokasinya ada di dua Kabupaten, yaitu Dosay di Jayapura menerima 9 KK yang terdiri dari 22 jiwa. Sebagian lagi ditempatkan di lokasi Kumbe, Kabupaten Merauke sebanyak 27 KK meliputi 72 jiwa.

Rekapitulasi jumlah KK transmigran yang diterima Irian Jaya selama Pra Pelita sebanyak 267 KK yang mencapai 1.000 jiwa. Jumlah lokasi yang ditempati ada 6 tempat dan tersebar di 4 Kabupaten, yang terbanyak diantaranya Merauke 3 lokasi.

Pengiriman transmigran ke Irian Jaya dalam masa Pelita dimulai semenjak tahun 1972. Daerah penerima ditetapkan 3 Kabupaten, yaitu Manokwari, Paniai dan Jayapura. Di Manokwari hanya ditempatkan ke lokasi yang sudah dibuka pada tahun terakhir Pra Pelita. Jumlah yang dikirim adalah 100 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 411 orang. Lokasinya masih tetap di Oransbari.

Di Kabupaten Paniai, dibuka lokasi baru yaitu Girimulya. Jumlah yang ditempatkan di lokasi ini adalah 156 KK yang meliputi 300 jiwa. Sedang jatah untuk Kabupaten Jayapura hanya mengisi kekurangan lokasi Dosay dengan 30 KK yang terdiri dari 135 jiwa.

Tahun 1973 tidak adas pembukaan lokasi baru. Pengiriman transmigran hanya mengisi kekurangan lokasi Oransbari di Manokwari dengan 50 KK yang terdiri dari 247 jiwa. Demikian pula di Girimulya, Kabupaten Paniai menerima 50 KK terdiri dari 235 jiwa.

Penempatan transmigran selama Pelita I hanya mencapai 260 KK, yang terdiri dari 1.184 jiwa. Selama periode Pelita I lokasi baru hanya di Kabupaten Paniai, sedang di 3 Kabupaten lainnya hanya mengisi kekurangan sebelum Pelita I dimulai.

Selama Pelita II, penempatan transmigran di Irian Jaya mencapai 1.000 KK yang terdiri dari 4.303 jiwa. Selama periode ini selain 4 Kabupaten yang selama Pelita I menerima transmigran, Kabupaten

From the viewpoint of period, the transmigration from other areas to Irian Jaya can be divided into two pahses. The first phase is the transmigration prior to the Pelita programme, and the second one is the transmigration in line with the implementation of Pelita programme. The Prae-Pelita transmigration programme covered only a small number of transmigrants. While during the Pelita, the transmigration programme was carried out on a large scale by a systematic plan supported with a large amount of finance. Accordingly, the locatins of transmigration had been more spreading and the praparation of the programme itself had been better than the former.

The first transmigration programme was launched in 1964, that was two years after Irian Jaya had been handed over by the UNTEA to the Republic of Indonesia in 1962. The number of the transmigration was 49 families consisting of 94 members. There were 2 locations, Dosay in Jayapura District where 9 families having 22 members started to live in , and Kumbe in Merauke wher 27 families having 72 members had started to settle.

In total, the number of transmigrant to Irian Jaya during the Prae-Pelita was 257 famlies having up to 1.000 members. While the number of the location was 6 spreading over 4 districts, of which 3 were in the District of Merauke.

The transmigration programme during the era of Pelita was started in 1972. Three districts had been apppointed as the settlement areas, they were Manokwari, Paniai and Jayapura. The settlement area in Manokwari was that which had been previously opened during the Prae-Pelita programme. The number of transmigrants was 100 families with 411 members, and the settlement area was Oransbari.

A new settlement area had been opened later in Paniai District named Girimulya. The number of transmigrants settling the new area was 156 families with 300 members. While the settlement area in Jayapura District had been to fulfil the lack of settlement area in Dosay, where 30 families with 135 members were sent to.

In 1973, there was no new settlement area establieshed. The transmigrants setn to Irian Jaya during that year were supposed to merely fulfil the vacant areas of settlement in Oransbari and Manokwari. The number of the transmigrants sent to thos two locations was 50 families having 247 members. So were the 50 families with 235 members who were transmigrated to Girimulya settlement area in Paniai District.

The total number of transmigrants to Irian Jaya during Pelita I was only 250 families consisting of 1.184 members. During the same period, there was only one establishment of new settlement area, that was in Paniai. While the settling in 3 districts was regarded as fulfilling the vacant areas of settlement in those 3 districts opened before the commencing of Pelita I.

During the Pelita II, the number of transmigrants had reached 1.000 families with 4.303 members. During the above period, besides the existing

Sorong diproyeksikan pula sebagai daerah penerima para transmigran. Dalam periode ini Sorong membuka 2 lokasi, yaitu di Klasaman I dan II masing-masing menerima 60 KK yang meliputi 217 jiwa dan 90 KK meliputi 449 jiwa.

Di Kabupaten Manokwari, hanya menerima 100 KK, terdiri dari 430 jiwa. Dengan demikian selama Pelita I dan II Manokwari tidak membuka lokasi baru, akan tetapi hanya mengisi kekurangan KK di lokasi yang telah ada, yaitu lokasi yang dibuka sebelum Pelita dimulai.

Di Kabupaten Paniai, selama Pelita II dibuka lokasi baru yaitu di **Bumi Wonorado. Jumlah KK yang ditempatkan sebanyak 200 KK, ter**-diri dari 713 jiwa.

Di Kabupaten Jayapura, dibuka 3 lokasi. Yaitu Karya Bumi I, II dan Nimbukrang I. Jumlah transmigran yang ditempatkan selama periode ini antara lain : Karya Bumi I pada tahun anggaran 1975/1976 menerima 100 KK terdiri dari 478 jiwa. Di Karya Bumi II menerima transmigran tahun anggaran 1976/1977 sebanyak 50 KK terdiri dari 208 jiwa. Sedang Nimbukrang I menerima 400 KK terdiri dari 1.808 jiwa. Dengan demikian selama Pelita II daerah penerima transmigran di Irian Jaya hanya 4 Kabupaten. Yaitu Sorong, Manokwari, Paniai, dan Jayapura. Sedang Merauke sama sekali tidak menerima transmigran, bahkan sejak Pelita I.

Sehubungan dengan semakin besarnya dukungan anggaran, maka selama periode ini penempatan transmigran mencapai 16.404 KK yang terdiri dari 68.628 jiwa. Selama Pelita III Kabupaten Sorong misalnya membuka 6 lokasi. Manokwari 3 lokasi, Paniai 1 lokasi, Jayapura 4 lokasi dan Merauke selain menambah jumlah KK di lokasi yang telah ada juga membuka lokasi baru di 6 tempat. Dengan demikian selama Pelita ini Kabupaten penerima transmigran adalah 5 buah, yaitu Sorong, Manokwari, Paniai, Jayapura dan Merauke.

Realisasi penempatan transmigran di lima lokasi itu antara lain : **Pertama,** Kabupaten Sorong. Di lokasi Aimas I ditempatkan 1.000 KK yang terdiri dari 4.412 jiwa. Jumlah manusia sebanyak itu berhasil ditempatkan hanya dalam satu tahun anggaran yaitu tahun pertama Pelita III. Di Aimas II mulai ditempati pada tahun ke-2 Pelita III.

Jumlahnya mencapai 2.000 KK yang terdiri dari 8.394 jiwa. Jumlah transmigran sebanyak ini hanya ditempatkan dalam satu tahun anggaran saja. Di Aimas III yang ditempati pada tahun anggaran 1981/1982 menerima 1.000 KK yang terdiri dari 4.247 jiwa. Di Aimas IV dan Pulau Salawati ditempati pada tahun anggaran 1982/1983 masing-masing 1.000 KK lterdiri dari 4.335 dan 400 KK atau 1.734 jiwa. Sedang pada tahun anggaran 1983/1984 (akhir Pelita III) Kabupaten Sorong kembali menerima 586 KK, terdiri dari 2.468. Penempatannya antara lain di Pulau Salawati sebanyak 200 KK terdiri dari 872 jiwa, untuk mengisi kekosongan yang ada sejak setahun sebelumnya. Di Aimas sebuah lahan baru ditempatkan 386 KK, terdiri dari 1.596 jiwa.

Kedua, Kabupaten Manokwari. Dalam periode Pelita III menambah lokasi di Prafi/Tj. Wibain. Para transmigran yang ditempatkan selama 3 tahun anggaran berturut-turut antara lain : 1981/1982 adalah 1.500 KK yang terdiri dari 6.250 jiwa, 1982/1983 sebanyak 550 KK terdiri dari 2.239 jiwa dan tahun anggaran 1983/1984 sebanyak 92 KK atau sebanyak 447 jiwa.

Ketiga, Kabupaten Paniai. Sejak dilaksanakan Pelita I sampai III hanya membuka 1 lokasi, yaitu di Nabire. Di lokasi ini ditempatkan transmigran selama 3 tahun anggaran berturut-turut. Tahun anggaran 1981/1982 sebanyak 500 KK atau 1.950 jiwa, tahun anggaran 1982/1983 sebanyak 695 KK atau 2.667 jiwa, dan tahun anggaran 1983/1984 sebanyak 261 KK terdiri dari 1.033 jiwa.

Keempat, Kabupaten Jayapura. Lokasi lahan Arso I dan II. Transmigran yang ditempatkan antara lain tahun anggaran 1982/1983 sebanyak 500 KK meliputi 2.160 jiwa dan tahun 1983/1984 sebesar 1.024 KK atau terdiri dari 4.407 jiwa.

Kelima, Kabupaten Merauke. Selain mengisi kekurangan KK di lokasi yang dibuka selama Pra Pelita, juga membuka beberapa lahan baru. Penambahan KK di Kurik misalnya sebanyak 400 KK terdiri dari 1.756 jiwa. Penambahan KK ini dilaksanakan pada tahun anggaran 1979/1980. Penempatan pada tahun anggaran 1981/1982 dilaksanakan di lokasi Wendu/Kumbe dan Jagebob. Jumlah KK yang diterima sebanyak 2.500 KK dengan jumlah jiwa 10.772. Sedang pada tahun anggaran 1983/1984 di lokasi Jagebob, Erom, St. Miring, Muram-Salor dan Kurik kembali dimukimkan 1.746 KK terdiri dari 7.082 jiwa.

Sampai akhir Januari 1985, transmigran yang sudah ditempatkan sebanyak 195 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 765. Yaitu di Arso III. Dengan demikian selama tahun ke-1 Pelita IV Kabupaten penerima transmigran di Irian Jaya hanya Kabupaten Jayapura. Lihat Tabel III-65.

settlement areas in 4 districts which had received transmigrants during the last Pelita I, the District of Sorong was also projected as the settlement area. The were two settlement areas opened in Sorong namely Klasaman I and Klasaman II, each of which had received 60 families with 217 members and 90 families with 449 members.

Manokwari District only received 100 families consisting of 430 members. Thus, there was no establishment of new settlement area in Manokwari during the Pelita I and the Pelita II except the settling which was considered to merely fulfil the vacant areas opened before the Pelita programme was commenced.

A new settlement area had been established in Paniai District named Sumi Wonorejo. The number of transmigrants was 200 families with 713 members.

Three setttlement areas had been established in Jayapura. They were named Karya Bumi I, Karya Bumi II and Wimbukrang I. The number of transmigrants during the above period was as follows: Karya Bumi I during the 1975/1976 budget year received 100 families with 478 members. Karya Bumi II received 50 families with 208 members during the 1976/1977 budget year, while Wimbukrang I received 400 families with 1.808 members. Thus, there were only 4 districts receiving transmigrants in Irian Jaya during the Pelita II, they were Sorong, Manokwari, Paniai and Jayapura. Merauke had not received any transmigrant since the Pelita I.

Along with the increase of the financial support, the number of transmigrants during the above period had stepped up to 16.404 families consisting of 68.628 members. For instance, Sorong District had established 6 settlement areas during the Pelita III. Other newly-opened areas were 3 in Manokwari, 1 in Paniai and 4 in Jayapura. While receiving transmigrants in order to fulfil the still vacant settlement areas, Merauke had also established 6 new areas. Thus, during the above period there had been 5 districts receiving transmigrants, they were, Sorong, Manokwari, Paniai. Jayapura and Merauke.

In detail, the settling in the above-cited districts was as follows: First, Sorong District. The settlement areas named Kimas I received 1.000 families with 4.412 members. This number of transmigrant had been settled in the appointed areas within only one budget year that was during the first year of the Pelita III. Kimas II had begun to be settled in the second year of the Pelita III. The number of transmigrants was up to 2.000 families with 8.394 members. Such a lot of transmigrant had been put in the settlemen areas within only one budget year. Kimas III which was initially settled during the 1981/1982 budget year received 1.000 families with 4.247 members. Kimas IV and the Salawati Islan begun to received transmigrants during the 1982/1983 budget year each consisting of 1.000 families with 4.335 members and 400 families with 1.734 members. During the 1983/1984 budget year (the end of Pelita III), Sorong District had again received 586 families with 2.468 members. The settlement area in this district was among others, the Salawati Island (200 families with 879 members), which was meant to fulfil the vacant areas available since the previous year. Another newly established settlement area in Kimas had been used for 386 families with 1.596 members.

Second. Manokwari District. During the period of Pelita III, a new settlement area had been established in this district, that was in Prani/Tanjung (Cape) Wibaia. The numbers of transmigrants sent to that new area during the successive three budget years were: 1981/1982 = 526 families having 6.256 members, 1982/1983 = 550 families with 2.239 members, and 1983/1984 = 92 families with 447 members.

Third. Paniai District. From Pelita I up to Pelita III, there was only 1 settlement area established in this district, that was in Nabire. The numbers of transmigrants settling the above area during the successive three budget years were as follows: 1981/1982 = 500 families with 1.950 members, 1982/1983 = 695 families with 2.267 members, 1983/1984 = 261 families with 1.033 members.

Fourth. Jayapura District. the settlement areas had been named Arso I and Arso II. The numbers of transmigrants to inhibit the two areas during the successive two budget years were : 1982/1983 = 500 families with 2.160 members. and 1983/1984 = 1.024 families with 4.407 members.

Fifth. Merauke District. While receiving transmigrants to fulfil the still vacant areas which had been opened since the prae Pelita, Merauke had also established some new settlement areas. For instance, the addition of 400 families with 1.756 members in Kurik area. This addition had been made during the 1979/1980 budget year. During the 1981/1982 budget year, other numbers of transmigrants had been put in Wendu/Kumbe and Jagebob settlement areas. the number was 2.500 families with 10.779 members. While during the 1983/1984 budget year, other 7.082 members of families had been added to the existing ones in Jagebob, Eram, St. Miring, Murum Salor and Kurik.

Until the last of Januari 1985, there were 195 families with 765 members that have been settled in the settlement area namely Arso III. Thus, during the whole first year of Pelita IV from all districts in Irian Jaya it was only Jayapura which received the transmigrations. See Table III-65

Tabel / *Table III — 65*

TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN DI IRIAN JAYA BERDASARKAN DAERAH ASAL (PRA PELITA S/D PELITA III)
TRANSMIGRANT IN IRIAN JAYA BY AREA OF ORIGIN (PRAE—PELITA TO PELITA III PERIODS)

No	Lokasi / *Settlement Area*	Target / *Target*	DAERAH ASAL / *AREA OF ORIGIN*: Jawa Barat/ *West Java* KK *Family*	Jawa Barat/ *West Java* Jiwa *Member of Family*	Jawa Tengah/ *Central Java* KK *Family*	Jawa Tengah/ *Central Java* Jiwa *Member of Family*	D.I. Yogya / *Special Area of Yogyakarta* KK *Family*	D.I. Yogya / *Special Area of Yogyakarta* Jiwa *Member of Family*	Jawa Timur/ *East Java* KK *Family*	Jawa Timur/ *East Java* Jiwa *Member of Family*	Bali KK *Family*	Bali Jiwa *Member of Family*	APDT KK *Family*	APDT Jiwa *Member of Family*	Jumlah/*Total* KK *Family*	Jumlah/*Total* Jiwa *Member of Family*
1.	Dosay	-	-	-	57	216	-	-	-	-	-	-	-	-	57	216
2.	Kumbe	-	-	-	27	72	-	-	-	-	-	-	-	-	27	72
3.	Kurik	-	-	-	88	348	-	-	-	-	-	-	-	-	88	348
4.	Kuprik	-	-	-	54	207	-	-	-	-	-	-	-	-	54	207
5.	Nabaruo	-	11	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	31
6.	Oransbari	-	30	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	126
	PELITA I															
1.	Dosay	-	-	-	30	135	-	-	-	-	-	-	-	-	30	135
2.	Girimulyo	-	-	-	80	398	-	-	-	-	-	-	-	-	80	398
3.	Oransbari	-	-	-	150	650	-	-	-	-	-	-	-	-	150	650
	PELITA II															
1.	Bumi Wonorejo	200	-	-	200	713	-	-	-	-	-	-	-	-	200	713
2.	Karyabumi	150	-	-	100	478	-	-	50	208	-	-	-	-	150	686
3.	Klasaman	150	-	-	90	449	-	-	60	217	-	-			150	666
4.	Nimbokrang I	400	-	-	225	1160	-	-	135	548	-	-	40	160	400	1868
5.	Oransbari	100	-	-	-	-	-	-	90	395	-	-	10	35	100	430
	PELITA III															
1.	Nimbokrang II	600	100	302	140	634	-	-	300	1253	-	-	60	300	600	2489
2.	Kurik I	400	-	-	150	671	-	-	211	924	-	-	39	161	400	1756
3.	Aimas I (1,2)	1000	250	979	200	890	100	352	307	1305	43	146	100	470	1000	4342
4.	Aimas II (1,2,3,4)	2000	254	936	793	3549	78	225	638	2690	51	184	186	813	2000	8394
5.	Merauke	2550	90	-	1415	-	90	-	700	-	-	-	255	-	-	-
6.	Aimas III	1000	185	814	-	-	22	71	687	2862	-	-	106	473	1000	4220
7.	Prafi	1500	-	-	540	2425	175	585	635	2615	-	-	75	362	-	-
8.	Kalibumi	500	-	-	254	1040	77	259	121	478	-	-	48	218	500	1995
9.	Arso Koya	500	-	-	175	662	-	-	200	832	-	-	125	666	500	2160
10.	Aimas IV	1000	-	-	302	1593	-	-	448	1707	-	-	250	1281	1000	4581
11.	P. Salawati	400	-	-	212	932	-	-	88	377	-	-	100	425	400	1734
12.	Prafi (Tg. Wobaim)	550	-	-	150	-	100	-	162	-	-	-	138	-	-	-
13.	Kalibumi	750	-	-	270	-	-	-	293	-	-	-	187	-	-	-

Sumber data : Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Irian Jaya.
Source of Data : Subsidiary of Department of Transmigration in Irian Jaya Province.

BAB / *CHAPTER IV*

PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
SOCIO—CULTURAL DEVELOPMENT

PEMBANGUNAN bidang sosial di Propinsi Irian Jaya sejalan dengan pembangunan Nasional dan dengan mengingat kondisi serta potensi daerah, harus senantiasa melihat tingkat perkembangan penduduk mereka yang tinggal di pedalaman dan terisolir. Oleh sebab itu pembangunan sosial budaya merupakan hal yang sangat mendesak seiring dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Dibalik potensi yang dimiliki Irian Jaya, masih banyak ditemukan berbagai masalah di bidang sosial budaya yang senantiasa menimbulkan pengaruh dalam kehidupan sosial, kerawanan sosial. Hal ini timbul karena masih rendahnya tingkat kehidupan dan tingkat kesehatan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, serta faktor sosial lainnya.

1. Agama

Kehidupan masyarakat Irian Jaya setiap harinya sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan berkembangnya nilai-nilai agama dan kepercayaan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan kalau kita menyebutkan masyarakat Irian Jaya adalah masyarakat religius. Awal pertumbuhan agama di daerah ini sangat dipengaruhi kebudayaan dan demikian sebaliknya kebudayaan yang ada di Irian Jaya juga sangat dipengaruhi oleh agama. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk Irian Jaya hanya sebanyak 2,84% belum memeluk agama.

Perkembangan Agama di daerah ini seperti Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Agama Hindu dan Budha, sudah sejak dahulu menjadi sasaran para penyebar agama.

Seperti Agama Islam misalnya sudah sejak abad ke-XV, masuk di Irian Jaya yaitu di Kabupaten Sorong dan Fak-Fak melalui pedagang-pedagang Muslim. Beberapa peninggalan sejarah yang menjadi tanda bukti dapat kita jumpai di Irian Jaya. Pengembangan Agama Islam di Irian Jaya khususnya di daerah Sorong dan Fak-Fak pada mulanya dilakukan oleh raja-raja Tidore dan Ternate dari Maluku dan pedagang-pedagang Bugis melalui Maluku Tengah dan diteruskan oleh Haweten Attamimi, seorang pedagang Arab dari Ambon melalui Seram Timur. Kedua daerah tersebut (Sorong dan Fak-Fak) karena adanya pembinaan secara terus menerus maka sampai sekarang perkembangan agama Islam pada kedua daerah ini berkembang dengan subur menjadi daerah yang berpenduduk Agama Islam yang terbanyak di Propinsi Irian Jaya.

Perkembangan Agama Kristen Protestan dan Katolik juga mengalami serupa. Adanya kelonggaran dan kesempatan diberikan Pemerintah Belanda pada waktu itu bagi Missionaris dan Zending. Dan kegiatan Missionaris dan Zending sampai sekarang masing-masing sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan tingkat sosial di Irian Jaya. Hanya Agama Hindu dan Budha, baru setelah Irian Barat kembali kepangkuan Indonesia mulai masuk.

a. Lembaga Keagamaan di Irian Jaya

Lembaga keagamaan di Propinsi Irian Jaya sejak mulanya sudah berkembang dengan pesat. Terlebih-lebih dalam era pembangunan kesempatan untuk lebih berkembang sangat terbuka kesempatannya. Oleh karena itulah berkembang sangat terbuka kesempatannya. Oleh karena itulah organisasi Keagamaan di Irian Jaya sekarang ini mempunyai potensi besar sebagai partner Pemerintah dalam pembinaan masyarakat. Sampai saat ini (1986) didapat 66 buah organisasi keagamaan di Irian Jaya yaitu : Kristen Protestan 49 buah, Katholik 8 buah, Islam 8 buah, Hindu 1 buah. Dari seluruh organisasi keagamaan ini 9 buah adalah zending dan missionari asing. Table IV-1.

Kegiatan organisasi keagamaan disamping membina keimanan jemaatnya juga melakukan penyebaran agama kepada suku-suku terasing yang belum memeluk agama. Selain itu organisasi-organisasi tersebut juga aktif dalam pendidikan. Dan untuk menjangkau penduduk di daerah pedalaman zending dan missionari mempunyai kegiatan penerbangan dan air-strip untuk melayani kegiatan penginjilan mereka. Organisasi yang mempunyai angkutan udara ini banyak membantu pelayanan pemerintah daerah di daaerah pedalaman.

b. Pemeluk Agama

Rakyat Irian Jaya mayoritas beragama Kristen Protestan dan agama Katholik terutama di daerah pedesaan dan pedalaman, sedang agama lainnya adalah agama Islam, Hindu dan Budha dan umumnya dapat kita jumpai di kota-kota dan daerah transmigrasi di pinggiran kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Irian Jaya tahun 1983 pemeluk agama seluruhnya ber-

THE DEVELOPMENT in socio-cultural field in the province of Irian Jaya goes parallel with the National Development, taking into consideration the regional condition and potentials and also the population growth in the isolated and remote areas. This makes the socio-cultural development significant as that of the other fields.

Aside from its potentials, Irian Jaya also has social problems which hamper social life. This is due to the poor living condition of the people in the health, education and other social factors.

1. Religion

The daily life of the Irian Jaya people goes together with the development of their religious norms. With this fact we can say that these people are a religious community. The growth of religions in Irian Jaya is very much influenced by the local tradition and also the other way around their tradition is influenced by religion. They all area religion worshippers except 2.84% who have not embraced any religion yet.

Since the past centuries this region has become the destination of religious teachers of the Islam, Catholic and Protestant religions. The Islam religion entered Irian Jaya through Sorong and Fak-Fak Districts in the 15th century, brought by Muslim traders. The are historical findings which can prove that Islam in Irian Jaya especially in Sorong and Fak-Fak was brought by the Kings of Tidore and Ternate in Maluku and the Buginese merchants through Central Maluku. This was further taken over by haweten Attamimi, an Arab merchant from Ambon who travelled via East Ceram. The two districts of Sorong and Fak-Fak until today accomodate most of the Moslem population of the Irian Jaya Province.

The Protestant and Catholic religions entered this region during the Dutch occupation when the Zending (Dutch Protestant Mission) and Catholic Missionaries introduced their teachings here. Until today the Zending and Catholic Missionaries extend assistance in improving the social condition of the Irian Jaya population. Hinduism and Buddhism found their way to Irian jaya only after Irian Jaya became part of the Republic of Indonesia.

a. Religious Institutions in Irian Java

Religious institutions in the province of Irian Jaya have been developing rapidly, especially during the National Development era. It has become a potential partner of the Government to promote the community. Until 1986 there were 66 religious organisations in this province, namely 49 of the Protestants, 8 Catholic organisations, 8 Islamic organisations and one of the Hindus. Of these organisations 9 area that of the foreign Zending and missionaries. See Table IV–1

The religous organisations spread their religions to the primordial tribes who are not followers of any religion yet besides performing their duties to guide and educate their congragations. The Protestant and Catholic missions even have air transports facilities and airstrips for gospel and people's education purposes. They also help the Government in its job to reach the people in remote areas.

b. Religion Followers

The majority of the Irian Jaya people worship the Protestant and Catholic religions, especially those in the rural and remote areas. Those embracing Islam, Hinduism and buddhism are generally in the urban areas and transmigration locations.

According to data of the Regional office of the Department of Religious Affairs, in 1983 the numbers of religion followers in this region was 1,280,283 scattering in nine districts, while in 1985 the Regional Statistical Office of Irian Jaya registered 1,287,685 religion followers. See Table IV-2.

c. Places of Worship

The development of worship facilities in Irian Jaya has never lingered. These facilities have increased according to the need of the community. In 1983 data show that the number of worship places in the districts was 2,895 while in 1985 it grew to 2,997. In parallel with this development, religious teachers of the various religiouns also increased in number and performed their duties in all the nine districts of Irian Jaya. See Table IV– 3 and IV – 4

2. Education and Culture

Compared to the other provinces of Indonesia, the development of Education in Irian Jaya is lacking far behind, especially during Pelita (Five-Year

Tabel / *Table IV — 1*

ORGANISASI LEMBAGA KEAGAMAAN DI IRIAN JAYA TAHUN 1986
RELIGIOUS INSTITUTIONS IN IRIAN JAYA 1986

No	Nama Organisasi Name of Organisation	Tempat Kedudukan Location
1	2	3
I.	GEREJA KRISTEN PROTESTAN PROTESTANT CHURCH	
1.	Gereja Kristen Injil di Irian Jaya (GKI)/ *Evangelical Christian Church In Irian Jaya*	Jayapura
2.	Gereja Bethel Pantekosta Irian Jaya (GBP)/ *Pentecostal Bethel Church, Irian Jaya*	Jayapura
3.	Gereja Pantekosta Indonesia (GPI)/ *Indonesian Pentecostal Church*	Jayapura
4.	Gereja Bethel Indonesia (GBI)/ *Indonesian Bethel Church*	Jayapura
5.	Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KNGMI) *Evangelical Camp of Indonesian Christian Church*	Jayapura
6.	Gereja Masehi Advent Hari ke 7/ *The Seventh Day Advent Church*	Jayapura
7.	Gereja Baptis Irian Jaya Indonesia (GBIJ)/ *Indonesian Baptist Church in Irian Jaya*	Jayapura
8.	Gereja Injil Irian Jaya (GIIJ)/ *Evangelical Church in Irian Jaya*	Jayapura
9.	Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK)/ *Holy Word Christian Church*	Jayapura
10.	Gereja Protestan Maluku (GPM)/ *The Protestant Church in the Moluccas*	Fak-Fak
11.	Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPPS)/ *Surabaya Central Pentecostal Church*	Manokwari
12.	Gereja Kalvari Pantekosta Missi Indonesia/ *Indonesian Mission Pentecostal Calvary Church*	Biak
13.	Gereja Sidang Allah Indonesia/ *Indonesian Assemblies of God Church*	Manokwari
14.	Persekutuan Alkitab Kristen/ *Christian Biblical Communion*	Manokwari
	ZENDING—ZENDING ASING/ FOREIGN MISSIONARIES	
15	*Christian and Missionary Alliance (CAMA)*	*Jayapura*
16.	*Region Beyond Missionary Union (RBMU)*	*Karubaga Jayawijaya*
17.	*Zending Geremormerde Kerken (ZGK)*	*Merauke*
18.	*Univengelized Fieled Mission (UFM)*	*Mulia Paniai*
19.	*Nederland Reform Congregation (NRC)*	*Pas Valley Jayawijaya*
20.	*The Evangelical Alliance Mission (TEAM)*	*Manokwari*
21.	*Australian Pasific Christian Mission (APCM)*	*Bokodini Jayawijaya*
22	*Missionary Aviation Fellowship (MAF)*	*Sentani Jayapura*
23.	*Australian Baptist Missionary Society (ABMS)*	*Tiom Jayawijaya*
II.	GEREJA KATOLIK/CATHOLIC CHURCHES	
1.	Keuskupan Agung Merauke/ *Arch Bishopric of Merauke*	Merauke
2.	Keuskupan Jayapura/*Bishopric of Jayapura*	Jayapura
3.	Keuskupan Sorong/*Bishopric of Sorong*	Sorong
4.	Keuskupan Agats/*Bishopric of Agats*	Agats Merauke
III.	ORGANISASI ISLAM/ISLAMIC ORGANISATIONS	
1.	*Muhammadiyah*	*Jayapura*
2.	*Nahdhatul Ulama (NU)*	*Jayapura*
3	*Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI)* *Coordinating Efforts for Islamic Education Improvement*	*Jayapura*
4.	Majelis Ulama Indonesia Wilayah Irian Jaya (MUI)/ *Indonesian Islamic Scholars Council of Irian Jaya*	Jayapura
5.	Pelajar Islam Indonesia (PII)/ *Indonesian Islamic Students*	Jayapura
6.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)/ *Islamic Students Association*	Jayapura
7.	Majelis Da'wah Islamiyah/ *Islam Preachers Board*	Jayapura
IV.	HINDU BUDHA	
1.	Parisada Hindu Dharma Prop Irian Jaya/ *Hindu Dharma Council of Irian Jaya Province*	Jayapura

Sumber : Kantor Wilayah Dep Agama Propinsi Irian Jaya
Source : Regional Office of the Department of Religious Affairs, Irian Jaya.

jumlah 1.280.283 orang yang tersebar di 9 (sembilan Kabupaten, sedangkan tahun 1985 diperoleh data dari kantor Statistik Propinsi Irian Jaya sebanyak 1.287.685 orang. Lihat Tabel IV-2.

Tabel / *Table IV — 2*

JUMLAH UMAT BERAGAMA DI PROPINSI IRIAN JAYA
MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985
NUMBER OF RELIGIOUS FOLLOWERS IN IRIAN JAYA BY DISTRICT 1985

No.	Kabupaten *Districts*	Protestan *Protestants*	Katolik *Chatholics*	Islam *Moslems*	Hindu *Hindus*	Budha *Buddhists*	Lain-lain *Others*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Merauke	28.093	131.811	34.840	343	62	-
2.	Jayawijaya	185.120	60.984	1.843	4	-	-
3.	Jayapura	106.795	11.932	56.304	582	369	-
4.	Paniai	132.660	54.975	10.314	135	13	-
5.	Fak-Fak	19.993	22.993	22.387	21	-	-
6.	Sorong	91.004	11.294	55.069	459	219	-
7.	Manokwari	78.850	9.941	22.988	171	35	-
8.	Yapen Waropen	55.529	284	2.358	4	207	-
9.	Biak Numfor	67.503	1.859	9.095	57	153	-
	Irian Jaya	763.547	306.076	215.198	1.806	1.058	

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985
Source : Irian Jaya in Figures, 1985.

Tabel / *Table IV — 3*

JUMLAH TEMPAT IBADAH DI PROPINSI IRIAN JAYA
MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985
NUMBER OF PLACES OF WORSHIP IN THE PROVINCE OF IRIAN JAYA BY DISTRICT 1985

Kabupaten *District*	Gereja / *Churches* Protestan *Protestant*	Gereja / *Churches* Katolik *Catholic*	Mesjid *Mosques*	Pura Hindu *Hindu Temples*	Wihara Budha *Buddhist Viharas*
2	3	4	5	6	7
Merauke	214	361	64	-	-
Jayawijaya	324	70	6	-	-
Jayapura	287	24	66	2	-
Paniai	92	89	11	1	-
Fak-Fak	98	58	77	-	-
Sorong	244	35	138	3	1
Manokwari	264	26	34	-	-
Yapen Waropen	162	1	2	-	-
Biak Numfor	229	1	22	1	-
Irian Jaya	1.904	665	420	7	1
1984	1.70	661 r)	417	6	-
1983	1.701	656 r)	417	6	-
1982	1.693	605	291	4	-
1981	1.693	605	252	2	-

Sumber : Kanwil Dept Agama Propinsi Irian Jaya
Source : Regional Office of the Department of Religious Affairs in Irian Jaya Province.

Development) I and II. The main cause to this situation is that during the Dutch colonial administration in this province, the people did not get much of formal education. Furthermore the poor communication facilities made it very hard for the peopel to go from one place to another. This makes it difficult for those in remote areas to obtain formal education. That is why until today, efforts to improve education in Irian Jaya has been carried out specifically. In 1963 when Irian Jaya integrated region was relatively low but gradually, through plannings of the Pelita I until the current Pelita IV it has been improving from year to year. Aside from education, the traditional arts and culture of Irian Jaya at the moment has found a way to come to the same level as that of the other provinces.

a. Elementary School – Junior High School – Senior High School

Efforts of the Government to develop education in Irian Jaya have now become a reality, because only after the integration of this region with the Republic of Indonesia was it possible for the national education system to reach the people or Irian Jaya. Only by this way can the people of Irian Jaya profit a better life in conformity those in the other provinces.

The realisation of national education in Irian Jaya is in line with Government Regulation No 65 of 1951 concerning the administering of a part of education and cultural matters by the Autonomous Administration and the Government Regulation no 32 of 1958 concerning stipulation on subsidies to private schools. In 1974 the President of the Republic of Indonesia has issued and Instruction which is known as INPRES (Instruction of the President) and since then there has been developments of SD INPRES (INPRES-

c. Tempat Peribadatan

Pembangunan sarana peribadatan di Irian Jaya tidak pernah ketinggalan. Sarana peribadatan ini juga ikut berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data yang diperoleh pada tahun 1983 tentang banyaknya tempat-tempat ibadah dari masing-masing Kabupaten seluruhnya berjumlah 2.895 buah, sedangkan dalam tahun 1985 menjadi berkembang sebanyak 2,997 buah. Sejalan dengan perkembangan tersebut, rohaniawan yang tersedia juga makin banyak jumlahnya dan mereka menyebar di semua Daerah Tingkat II. Lihat Tabel IV- 3 dan IV-4.

Aid for Primary School Development) in this province. The construction of SD INPRES has increased the number of Elementary School pupils from 58,913 in 1974 to 176,123 pupils in 1983. This was made possible by the number of these SD INPRES which was build throughout the province, even in the remote areas, widening the education opportunity for children of 7 to 12 years old in the province of Irian Jaya. See Table IV–5 and IV–6

The development of education in Irian Jaya since Pelita I until Pelita IV covers Kindergarten, Elementary School, Junior High School, Senior High School and Higher Education. At present in every district of Irian Jaya and

Tabel / *Table IV — 4*

ROHANIAWAN/ROHANIAWATI DI IRIAN JAYA SAMPAI DENGAN TAHUN 1983 MENURUT KABUPATEN
RELIGIOUS TEACHERS IN IRIAN JAYA BY DISTRICT UNTIL 1983

No.	Kabupaten *Districts*	Rohaniawan / *Religious Teachers*							
		Protestan *Protestant*		Katolik *Catholics*		Islam *Moslems*	Hindu *Hindus*	Budha *Buddhist*	Jumlah *Total*
		WNI *Indonesian*	WNA *Foreign*	WNI *Indonesian*	WNA *Foreign*				
1.	Jayapura	381	125	14	23	106	7	1	657
2.	Biak Numfor	214	4	3	1	9	2	-	233
3.	Yapen Waropen	169	-	-	-	20	-	-	189
4.	Manokwari	1022	11	4	2	15	1	-	1055
5.	Sorong	163	3	15	13	39	4	-	237
6.	Fak-Fak	48	20	9	-	61	-	-	138
7.	Merauke	103	42	44	70	16	1	-	276
8.	Paniai	93	-	10	19	31	1	-	154
9.	Jayawijaya	741	111	7	8	9	-	-	876
	Jumlah / *Total*	2934	316	106	136	306	16	1	3815

Sumber : *Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Irian Jaya.*
Source : Regional Office of the Department of Religious Affairs, Irian Jaya Province.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Perbandingan kemajuan pendidikan antara Propinsi Irian Jaya dengan Propinsi lainnya di Indonesia, Propinsi Irian Jaya masih jauh ketinggalan, terlebih-lebih kalau kita bandingkan dalam Pelita I dan ke II. Penyebab utama adalah karena selama Belanda berkuasa di Propinsi ini, masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Kemudian hubungan antara satu tempat dengan lainnya juga sangat berat, sehingga penduduk yang tinggal di pedalaman susah untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan formal. Oleh karena itulah sampai sekarang upaya untuk pengembangan pendidikan di Irian Jaya perlu digarap secara khusus. Tahun 1963 ketika Irian Jaya kembali menyatu pada Negara Kesatuan RI, melalui Pelita I sampai ke IV sekarang ini perkembangan pendidikan di Irian Jaya mengingat dari tahun ke tahun. Selain pendidikan, seni budaya asli Irian Jaya pada saat ini pula sudah sanggup dipentaskan baik dalam tingkat Propinsi maupun tingkat nasional.

a. SD — SMP — SMTA

Upaya Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan di Irian Jaya benar-benar suatu kenyataan dan bukan tinggal kata-kata, sebab setelah Irian Jaya kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, barulah pendidikan nasional memasuki kehidupan masyarakat Irian Jaya. Dengan melalui pendidikan nasionallah, kehidupan masyarakat Irian Jaya bisa ditingkatkan sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia lainnya yang lebih dahulu mengenyam pendidikan nasional.

Pelaksanaan pendidikan nasional di Irian Jaya berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 65 tahun 1951 yang mengatur penyerahan **sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan kepada Pemerintah** Otonom dan Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1958 mengenai ketentuan-ketentuan pemberian subsidi kepada penyelenggara sekolah swasta. Pada tahun 1974 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi yang terkenal dengan INPRES, dan sejak saat itu SD INPRES yang dibangun di Propinsi Irian Jaya. Pembangunan SD INPRES ini telah meningkatkan jumlah murid SD dari 58.913 pada tahun 1974 menjadi 176.123 orang murid pada tahun 1983. Ini mungkin tercapai karena SD INPRES tersebut telah tersebar hingga ke pelosok-pelosok Irian Jaya yang memperluas kesempatan belajar dari anak-anak usia 7-12 tahun di pedalaman sekalipun. Lihat Tabel IV-5 dan IV-6.

Pengembangan pendidikan di Irian Jaya sejak Pelita I sampai Pelita ke IV sekarang ini dimulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan **Pertama, Sekolah** Lanjutan Tingkat Atas dan

Tabel / *Table IV — 5*

JUMLAH LULUSAN SD PROPINSI IRIAN JAYA SELAMA EMPAT TAHUN PERTAMA PELITA III (1979/1980 s/d 1982/1983)
NUMBER OF ELEMENTARY SCHOOL GRADUATES IN THE PROVINCE OF IRIAN JAYA DURING THE FIRST FOUR YEARS OF PELITA III

Kabupaten *Districts*	1979/1980	1980/1981	1981/1982	1982/1983
Jayapura	2.400	2.446	2.742	2.951
Tlk. Cenderawasih	1.006	1.327	1.457	1.346
Yapen Waropen	749	860	948	888
Manokwari	785	942	1.093	1.245
Sorong	1.368	1.644	1.772	2.091
Fak-Fak	690	706	701	904
Merauke	1.213	1.392	1.673	1.949
Jayawijaya	950	1.102	1.316	1.142
Paniai	687	764	1.125	1.273
Irian Jaya	9.848	11.196	12.827	13.789

Sumber : *Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya.*
Source : Regional Office of the Department of Education and Culture, Province of Irian Jaya.

in Transmigration locations there are Kindergartens (2 years) and Elementary Schools (6 years) while vocational Senior Secondary Schools such as Home Economics High School (SKKA), Senior Technological High School (STM), Senior High School for Agricultural Technology (SPMA) and Senior Administration Education Course (KPPA) are only found in several districts. The number of Junior Secondary Institutre students, Governmentrun as well as private, in Pelita III has been increasing in accordance with the rise of Elementary School gradutates. If in 1979 the number of Junior Secondary Education students was 18,226, the next year it became 21,593 which in 1981/1982 rose to 24,321 reaching 27,880 in 1982/1983. It is worth noting that the private sector plays an important role in running private schools. In 1979/1980 from the 18,226 students of Junior Secondary Education Institutes 10,402 sat in private schools while in 1980/1981 the number of students in private schools was 11,690 out of 21,593. In 1981/1982 the students of Junior Secondary Education numbered 24,821 from which 13,484 were those of the private schools and until the fourth year of Pelita III of the total 27,880 students, 14,363 were those of the private schools. That is why the Government guides and supports all efforts of the private sector in the education field, especially in the framework of increasing the capacity of education infrastructure to be able to accomodate more students graduating from Elementary Schools and those from Junior High Schools. See Table IV–7 and IV–8.

Tabel / *Table IV — 6*

KEADAAN SEKOLAH DASAR DI PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 1985/1986
SITUATION OF ELEMENTARY SCHOOLS IN THE PROVINCE OF IRIAN JAYA

No.	Kabupaten *Districts*	Jumlah / *Number*						
		S D *Ele-mentary Schools*	Kelas *Class-rooms*	Murid / *Pupils*		Guru *Teachers*	P7 - 12	N E R
				Semua *Total*	7 - 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Ja apura	204	1.279	33.423	23.912	1.407	24.656	96.98
2.	Biak Numfor	154	946	17.261	11.715	902	12.125	96.61
3.	Yapen Waropen	123	721	11.711	9.892	701	11.436	86.03
4.	Manokwari	148	1.037	18.337	16.041	913	18.580	86.34
5.	Sorong	248	1.647	31.684	24.414	1.092	26.938	90.63
6.	Fak-Fak	148	883	13.883	11.562	795	12.045	95.99
7.	Merauke	299	1.822	36.735	32.911	1.354	35.526	92.64
8.	Jayawijaya	300	1.112	29.379	29.379	603	52.773	55.67
9.	Paniai	262	1.012	28.827	26.627	757	36.050	73.86
	Irian Jaya	1.886	10.459	221.240	186.453	8.524	229.023	81.02

Sumber : Buku Api Perjuangan Pembelaan Irian Barat oleh : Yayasan Badan Kontak Keluarga besar Pemuda Irian Barat, Jakarta 1986.
Book on Flame of Struggle of Irian Barat Independence by Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta 1986.

Perguruan Tinggi. Perkembangan sekarang sekolah Taman Kanak-Kanak 2 (dua) tahun dan Sekolah Dasar 6 (enam) tahun sudah ada di setiap Kabupaten dan juga di daerah transmigrasi. Sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas kejuruan seperti Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Teknologi Menengah (STM), Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) dan Kursus Pendidikan Administrasi Atas (KPAA) terdapat hanya di beberapa Kabupaten yang lebih maju. Jumlah murid SMTP negeri dan swasta dalam Pelita III tiap tahun meningkat sejalan pertumbuhan lulusan sekolah dasar. Jika tahun 1979 jumlah murid ada sebanyak 18.226 tahun berikutnya ada sebanyak 21.593 murid, dan tahun 1981/1982 sudah mencapai 24.821 serta tahun 1982/1983 mencapai 27.880. Kemudian perlu juga dicatat bahwa peranan swasta dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah di daerah ini cukup besar. Jika dilihat dari perkembangannya sejak tahun 1979/1980 dari 18.226 murid SMTP 10.402 murid berada di sekolah milik swasta tahun 1980/1981 dari 21.594 murid yang berada di sekolah swasta 11.690 murid. Tahun 1981/1982 murid SMTP yang berjumlah 24.821 diantaranya ada 13.484 murid swasta. Hingga tahun keempat Pelita III dari 27.880 murid SMTP di Irian Jaya, 14.363 murid SMTP swasta. Lihat Tabel IV-7 dan IV-8.

Oleh sebab itu Pemerintah senantiasa juga memberi pembinaan dan mendukung kegiatan swasta di bidang pendidikan ini. Agar dengan demikian partisipasi swasta dalam pendidikan. Terutama dalam rangka meningkatkan daya tampung jumlah murid SD untuk SMTP dan menampung lulusan SMTP di SMTA.

Tapi yang menjadi tantangan lebih besar dari Irian Jaya juga selama ini ialah dalam penyediaan guru. Sebab jarang sekali guru yang mau

However, a bigger problem confronting Irian Jaya is the availability of teachers. Not many teachers wish to be posted in this province voluntarily, but with some extra persuasion and incentives, this problem has been gradually overcome by the Government.

Cenderawasih University which is found in the Provincial capital ci of Jayapura and also in Manokwari have several Faculties namely those o Social and Politics Sciences, Paedagogy and Education Science, and the Faculty of Agriculture, Animal Husbandry and Forestry in Manokwari. In Jayapura there is also the Academy for Home Administration which prepare students to become Civil Administrators. Those newly graduated are usually posted at local government offices on sub-district level. Beside the Statenun university there is also the Privaterun namely. The Institute of Theology, the Catholic Theological Institute, Academy of Administration and Accounting Sciences and the Otto Geisler Economics Institute.

Other programmes carried out by the relating Government agencies in the non formal education are among others the Education and Training of the Rural Social Institution, Courses on Family Welfare Promotion, Elementary Education students Group, Courses of Special Skills, Vocational Study Group/Course, a Training Centre in Biak, Small Industries Counsel Guidance, Industrial Work Training Guidance and others. See Table IV–9 and IV–10

Tabel IV-10 clearly illustrates the ratio of student against class in the Senior Secondary Education Institutes is as low as 32,7 against one, while the indeal ratio is 40 against 1. If we compare the ratio of every kind of school, we will see that the decline occured in the Provincial Capital City

Tabel / *Table IV — 7*

LULUSAN SMTP DI PROPINSI IRIAN JAYA PER KABUPATEN TAHUN 1979/1980 - 1982/1983
JUNIOR SECONDARY EDUCATION GRADUATES IN IRIAN JAYA PROVINCE BY DISTRICT 1979/1980 - 1982/1983

Kabupaten *Districts*	Lulusan SMTP *Junior Secondary Education Graduates*											
	1979/1980			1980/1981			1981/1982			1982/1983		
	N *State run*	S *Private run*	JM *Total*	N *State run*	S *Private run*	JM *Total*	N *State run*	S *Private run*	JM *Total*	N *State run*	S *Private run*	JM *Total*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jayapura	723	456	1179	803	555	1358	839	727	1566	1050	754	1804
Tl. Cenderawasih	298	189	487	303	146	519	383	172	555	488	189	677
Yapen Waropen	38	319	357	63	311	374	97	233	330	152	235	387
Manokwari	150	170	320	183	203	386	294	253	547	273	297	570
Sorong	306	221	527	398	265	663	567	348	915	638	405	1043
Fak-Fak	96	182	278	104	185	289	118	203	321	174	234	408
Merauke	86	379	465	109	379	488	161	394	555	213	416	627
Jayawijaya	26	132	158	30	155	185	53	153	266	75	377	452
Paniai	85	157	242	140	259	399	170	360	530	119	383	502
Irian Jaya	1808	2205	4013	2203	2458	4661	2682	2843	5525	3182	3290	6472

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya.
Source : Regional Office of the Department of Education and Culture in Irian Jaya.

Tabel / *Table IV — 8*

KEADAAN SMTP DI PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 1985/1986
JUNIOR SECONDARY EDUCATION INSTITUTES IN IRIAN JAYA IN 1985/1986

No	Komponen Kabupaten *Districts*	Jumlah Sekolah *Number of Schools*	Ruang Belajar *Classrooms*	Kelas *Classes*	Jumlah Murid *Number of Students*	Jumlah Guru *Number of Teachers*	Usia 13-15 tahun *Age 13 to 15*		Angka Partisipasi *Participation rate*		Keterangan *Remarks*
							Penduduk *Population*	Murid *Students*	1985/1986	1984/1985	
1.	Jayapura	42	224	268	10.676	382	14.573	6.537	44,86	46,49	
2.	Biak Numfor	18	83	110	4.405	156	6.055	1.693	27,96	31,06	
3.	Yapen Waropen	10	22	40	1.594	25	5.059	390	7,71	13,53	
4.	Manokwari	24	74	102	4.201	149	7.645	1.884	24,64	18,54	
5.	Sorong	28	117	162	6.700	217	11.818	3.177	26,88	21,62	
6.	Fak-Fak	19	71	78	2.771	144	5.594	1.396	24,95	26,02	
7.	Merauke	30	126	132	4.915	151	13.866	2.730	19,69	17,01	
8.	Jayawijaya	21	102	93	4.091	65	24.629	3.815	15,49	9,73	
9.	Paniai	23	73	103	4.046	105	14.751	2.115	14,34	13,22	
	Irian Jaya	215	892	1.088	43.399	1.394	103.990	23.737	22,83	20,60	

Sumber : Buku Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat oleh : Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1986.
Source : Book on Flame of Struggle of Irian Barat Independence by Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat Jakarta 1986.

ditempatkan di daerah ini, tapi berkat adanya dorongan, persuasi serta insentif-insentif yang selama ini diberikan Pemerintah, lambat-laut kebutuhan akan guru dapat diatasi. Lihat Tabel IV-9 dan IV-10.

Universitas Cendrawasih berada di Ibukota Propinsi Jayapura di kota Manokwari. Jenis Program Studi dan Jurusan pada Universitas Negeri Cendrawasih meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan Ilmu-ilmu Pendidikan dan Fakultas Pertanian Peternakan dan Kehutanan (Manokwari).

Di Jayapura ada juga Akademi Pemerintah Dalam Negeri (APDN) yang mendidik Mahasiswa menjadi calon pimpinan Administrasi Pemerintahan. Biasanya para Alumni APDN yang baru, harus lebih dahulu ditempatkan di kantor Kecamatan. Selain Perguruan Tinggi di Jayapura ada juga Perguruan Tinggi Swasta yaitu : Sekolah Tinggi Theologia, Sekolah Tinggi Theologi Katholik, Akademi Ilmu Administrasi dan Akuntansi dan Sekolah Tinggi Ekonomi Ottow Geisler.

Pendidikan yang bersifat non-formal yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah antara lain : Pendidikan Latihan Lembaga Sosial Desa; Kursus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Belajar Pendidikan Dasar, Kursus Ketrampilan Khusus, Kursus/Kelompok Belajar Kejuruan, Training Centre di Biak, Bimbingan Penyuluhan Industri Kecil, Bimbingan Latihan Kerja Industri dan lain-lain.

Dengan memperhatikan tabel IV-10, tampak dengan jelas bahwa ratio murid : kelas SMTA masih sangat rendah yakni 32,7 : 1. Sedangkan ratio adalah 40 : 1. Kalau kita membandingkan ratio dari masing-masing jenis sekolah, maka kemerosotan ratio ini justru terjadi di Ibukota Propinsi yakni sebesar 30,4 : 1. Hal ini bisa terjadi karena hampir separoh jumlah sekolah yang ada berada di Jayapura, padahal murid ada di Jayapura hanya kira-kira ⅓ dari jumlah murid SMTA Irian Jaya. Artinya terjadi suatu perbandingan terbalik antara murid dengan sekolah. Analog dengan itu, apabila banyak sekolah, maka

which stands at 30,4 against 1. This could happen because almost half of all the schools in this province is located in the capital city, while students residing in Jayapura total only one third of all the Senior Secondary Education students in the province. This means that the ratio of students against school will be up-side down. But if there were more schools, the number of students will stay the same resulting in empty or half-filled classrooms which also will not reach the ratio of 40 against 1.

b. Development of the Higher Education

The University of Cendrawasih its establishment has been developing and improving in the administration and academic infrastructures. There has been constructions of buildings for classrooms, a laboratory, a library, housing complex, students dormitory and others. Improvements in the academic field are carried out by increasing the number of lecturers and enhancing the curriculum. These improvements have been carried out since 1980/1981 with a result of new curriculums for all the faculties of Cenderawasih University effective as of 1982/1983. The Semester Credit System started in 1982 and recruitment of new students through the pola perintis III (pioneer parttern III) started in 1983/1984. The University of Cenderawasih at the moment faces problems concerning accomodating the increasing number of students.

The alumni of this University numbered 1,697 in 1983/1984, consisting of 1,241 Bachelor of Arts, 175 Degree holders (Masters), and 281 Diploma holders. These scholars meet the need of the local Government for academic level personnel.

The Home Affairs Administration Academy in Irian Jaya so far has delivered 451 graduates who are working in local Government offices throughout the region. See Table IV – 11

Tabel / *Table IV — 9*

KEADAAN SMTA DI PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 1985/1986
SENIOR SECONDARY EDUCATION INSTITUTES IN IRIAN JAYA IN 1985/1986

No	Komponen Kabupaten *Districts*	Jumlah Sekolah *Number of Schools*	Ruang Belajar *Classrooms*	Kelas *Classes*	Jumlah Murid *Number of Students*	Jumlah Guru *Number of Teachers*	Usia 16-18 tahun *Age 16 to 18*		Angka Partisipasi *Participation rate*		Keterangan *Remarks*
							Penduduk *Population*	Murid *Students*	1985/1986	1984/1985	
1.	Javapura	17	136	230	7.171	287	13.473	4.432	32,90	35,16	
2.	Biak Numfor	5	36	48	1.769	34	5.216	832	15,95	18,68	
3.	Yapen Waropen	4	14	27	912	25	4.389	310	7,06	12,54	
4.	Manokwari	4	30	42	1.465	34	6.337	801	12,64	11,16	
5.	Sorong	10	51	73	3.174	90	9.818	1.634	16,64	15,20	
6.	Fak-Fak	3	11	21	817	18	4.656	385	8,27	7,50	
7.	Merauke	6	37	60	1.908	61	11.886	1.234	10,38	8,49	
8.	Javawijava	4	19	28	1.201	14	21.144	588	2,78	1,06	
9.	Paniai	3	9	24	924	13	12.758	432	3,39	7,68	
	Irian Java	56	343	553	19.341	576	89.677	10.648	11,87	11,80	

Sumber : Buku Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat oleh : Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1986.
Book of Flame of Struggle of Irian Barat Independence by Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat Jakarta 1986.

pula kelas yang tersedia, muridnya tetap saja, sehingga banyak kelas yang kekurangan murid atau tidak memenuhi syarat ratio 40:1.

b. Perkembangan Pendidikan Tinggi

Universitas Cenderawasih sejak berdirinya terus melaksanakan pengembangan dibidang prasarana administrasi maupun bidang akademis. Dalam segi prasarana telah dibangun gedung-gedung untuk ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, perumahan, asrama mahasiswa dan lain sebagainya. Pengembangan di bidang akademis dilakukan dengan penambahan jumlah tenaga pengajar, peningkatan tenaga pengajar serta pengembangan kurikulum. Usaha-usaha penyempurnaan kurikulum telah dilakukan sejak tahun 1980/1981. Hasil penyempurnaan tersebut adalah penetapan kurikulum baru bagi semua fakultas dan jurusan di lingkungan Universitas Cenderawasih yang diberlakukan mulai tahun 1982/1983. Sistem kredit semester dimulai sejak tahun 1982. Penerimaan Mahasiswa baru mulai ujian masuk dengan pola perintis III, dilaksanakan mulai tahun ajaran 1983/1984. Daya tampung sudah tidak dapat memenuhi minat untuk memasuki Universitas Cenderawasih yang semakin tahun semakin meningkat Alumni Universitas Cenderawasih sampai dengan tahun 1983/1984 adalah sebanyak 1.697 orang yang terdiri dari 1.241 orang Sarjana Muda, 175 orang Sarjana dan 281 orang Program Diploma. Tenaga-tenaga ini banyak membantu penyediaan tenaga tingkat akademis untuk daerah Irian Jaya.

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Irian Jaya, bertujuan untuk membentuk tenaga-tenaga trampil, ahli dan berilmu didalam bidang pemerintahan. Sampai saat ini APDN telah meluluskan 451 orang alumni yang bertugas di Pemerintah Daerah tersebar di seluruh Irian Jaya. Usaha-usaha pengembangan yang dilakukan adalah berupa peningkatan fasilitas-fasilitas fisik, perpustakaan perbaikan kurikulum, serta peningkatan mutu dan jumlah tenaga pengajar. Lihat Tabel IV-11

Kebudayaan

Berbicara tentang kebudayaan di Irian Jaya yang meliputi Bahasa, Adat Istiadat kesenian dan hukum adat cukup banyak ragamnya. Uraian ini memberikan gambaran kebudayaan Irian Jaya dilihat dari keseniannya yang dianggap sangat menonjol.

Didalam Pola Umum Pelita Nasional dan Daerah Irian Jaya dinyatakan bahwa kesenian daerah perlu ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kesenian nasional dan untuk memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, dan kebangsaan nasional atas dasar-dasar norma Pancasila. Pembinaan kesenian nasional yang menjurus kearah tumbuhnya dan berkembangnya kesenian patriotisme daerah atau rasa cinta tanah air dan kebangsaan nasional yang akan digunakan untuk menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang positif.

Berkaitan dengan perlunya peningkatan kesenian daerah ini, maka dengan pemunculan warna seni yang baru seperti Drama tari yang saat ini sedang dikembangkan dan dalam penanganan para seniman daerah itu sendiri termasuk daerah Irian Jaya.

Tahun 1984 Irian Jaya telah ikut mengambil bagian dalam perlombaan Pekan Drama Tari Tingkat Nasional. Pada waktu itu telah berhasil ditampilkan suatu produk seni drama tari yang untuk pertama kalinya diberi judul "MAMBAISENG". Drama ini diangkat dari cerita rakyat daerah Yapen Waropen Irian Jaya. Dengan mengangkat salah satu cerita rakyat tersebut untuk digubah dalam bentuk drama tari, diharapkan akan mencerminkan bahwa daerah tersebut sebenarnya telah memiliki nilai-nilai kemasyarakatan yang tinggi.

Diungkapkan dalam cerita rakyat tersebut bahwa seorang Raja atau kepala suku yang adil dan bijaksana pada suatu ketika ia terdorong keangkuhannya, telah bertindak kurang hati-hati dalam menilai kasus kehamilan anak gadisnya, sehingga keputusan hukumnya dirasakan tidak adil.

Ungkapan selanjutnya, bahwa dalam masyarakat di jaman itu sudah mengenal sistem pemerintahan yang teratur. Masyarakatnya sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan yang terpuji. Perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan tidak dibenarkan.

Sikap mengakui kesalahan yang pernah dibuatnya, walaupun dia seorang penguasa merupakan sifat kesatria. Disamping itu pula si anak gadisnya memiliki sifat-sifat yang agung dan anggun. Walaupun dia seorang Putri Raja, rela menerima hukuman sambil mengajukan pembelaan bagi rakyatnya yaitu bahwa rakyat yang tak bersalah tidak layak untuk mendapat hukuman.

Guna melatarbelakangi akting-akting yang diungkapkan dengan gerak tari dalam pementasan peranan musik sangat penting. Alat-alat musik dipergunakan antara lain terdiri dari : 1 buah tifa, 1 buah bambu dalam bentuk seperti kentongan, 1 triton (terbuat dari kulit kerang-trompet), 1 gong kecil, 1 suling bambu dan 1 ankilka (terbuat dari bambu atau kulit buah labu). Dan 1 kelambut berbentuk lesung. Un-

Tabel / *Table IV — 10*

RATIO MURID, KELAS SMTA PER JENIS SEKOLAH DAN KABUPATEN DI PROPINSI IRIAN JAYA PADA TAHUN AJARAN 1982/1983
SENIOR SECONDARY EDUCATION STUDENTS AND CLASSES RATIO BY TYPES OF SCHOOL AND DISTRICT IN IRIAN JAYA PROVINCE, SCHOOL YEAR 1982/1983

Kabupaten *District*	S M A *Senior High School*			S M E A *Senior High School for Economics*			S T M *Technological Senior High School*			S M K K *Senior High School for Home Economics*			S P G *Teacher Training School*			S G O *Sports Instructors Teacher High School*			Jumlah *Total*		
	M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R	M	K	R
Jayapura	2755	81	34:1	748	24	31,2:1	684	26	26,3:1	61	6	10,2:1	472	19	24,8:1	112	3	37,3:1	4832	159	30,4:1
Tl. Cenderawasih	578	15	38,6:1	489	13	37,6:1	-	-	-	-	-	-	88	3	29,3:1	-	-	-	1155	31	37,3:1
Yapen Waropen	451	12	37,6:1	146	4	36,5:1	-	-	-	-	-	-	93	3	31:1	-	-	-	690	19	36,3:1
Manokwari	720	21	34,3:1	246	10	24,6:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966	31	31,2:1
Sorong	1301	36	36,1:1	455	13	35:1	-	-	-	48	5	9,6:1	212	6	35,3:1	-	-	-	2016	60	33,6:1
Fak-Fak	385	11	35:1	191	7	27,3:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576	18	32;1
Merauke	851	23	37:1	288	8	36:1	232	9	25,8:1	-	-	-	155	5	31:1	-	-	-	1526	45	33,9:1
Jayawijaya	259	8	32,4;1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	4	33,8:1	-	-	-	394	12	32,8:1
Paniai	771	20	33,6:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771	20	38,6:1
Irian Jaya	8071	227	35,6:1	2563	79	32,4;1	916	35	26,2:1	109	11	9,9:1	1155	40	28,9:1	112	3	37,3:1	12926	395	32,7:1

Sumber : Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya
Source : Regional Office Department of Education & Culture, Irian Jaya Province.

Culture

Culture in Irian Jaya, which covers language, dialects, traditional customes, arts and the "adat" customary law system, is of different variaty. Following is and illustration about the culture of Irian Jaya viewed from some distinct traditional arts.

In the overall plan of the National Development and that of Irian Jaya Province it is stated that its traditional arts be improved in the framework of enriching National arts and culture in efforts to strengthen national indentity, self respect and nationality based on the normal of Pancasila, the State Philoshopy. The promotion of national arts and culture goes in line with the growth of regional arts of patriotism and love for the nation and country. This awareness will keep the people from neglecting their traditional arts when admitting particular aspects of foreign culture.

In connection with the efforts to enrich regional arts and crafts, Irian Jaya province has also been included in national levels of festivals on regional traditional dances. In 1984 Irian Jaya has partaken in The National Ballet Week and succeeded to stage a newly created ballet called "Mambaiseng" which

tuk melatarbelakangi akting-akting yang diungkapkan dengan gerak-gerak tari, peranan musik tak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu panggung musisi mutlak diperlukan. Selain berfungsi sebagai pembawa irama,

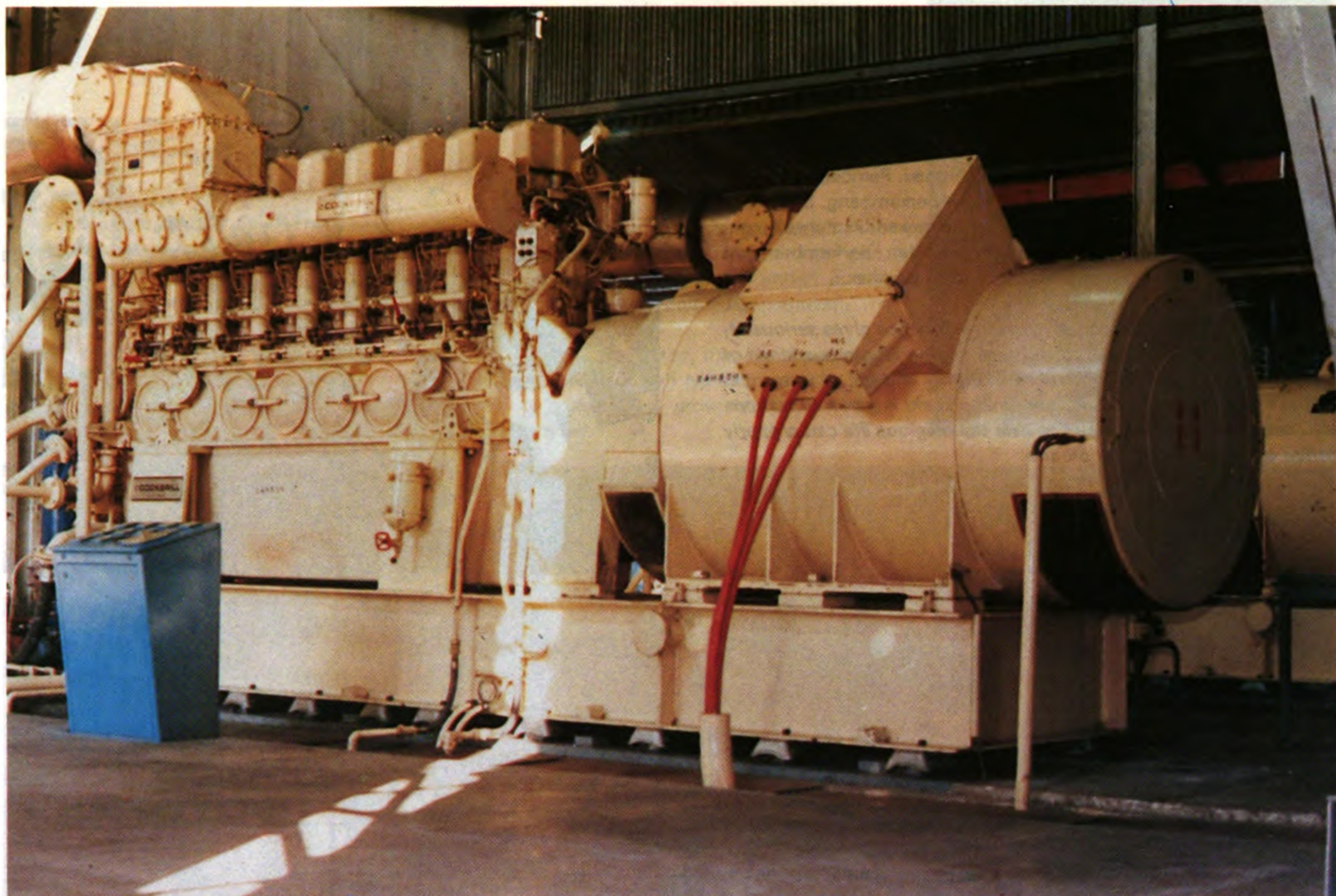
is composed from a folklore of the Yapen Waropen tribe. It depicts a folktale concerning a wise and just tribal chief who failed to take a fair decision when punishing his own daughter who became pregnant out of wedlock. But still

Tabel / *Table IV — 11*

PERGURUAN TINGGI DI IRIAN JAYA TAHUN 1983
HIGHER EDUCATION IN IRIAN JAYA, 1983

No	Nama, Tahun Berdiri *Year of Establishment*	Status *Status*	Fakultas, Jurusan *Faculty, Section*	Program Studi *Study Programme*	Mahasiswa *Student*	Dosen *Lectures*	Fasilitas *Facilities*	Alumni *Alumni*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Universitas Cenderawasih	Negeri	FKIP :	SO, S1, Sarmud	1.001	66	- Ruang kuliah	Sarmud - 28
1.	*Cendrawasih University*	*State-run*	*Faculty of Pedagogy and*	*Bachelor*			*Class Room*	*Bachelor*
			Teacher Training Institute					
	Tahun 1962		- IPS	SO, S1, Sarmud			- Laboratorium	Sarmud - 620
			Social Science Department	*Bachelor*			*Laboratory*	*Bachelor*
			- MIPA	SO, S1, Sarmud			- Asrama Mahasiswa	Diploma - 281
			Mathematics and Physic	*Bachelor*			*Student Dormitory*	*Diploma*
			Department					
			- Ilmu Pendidikan	SO, S1, Sarmud			- Perpustakaan	
			Pedagogy Department				*Library*	
			Fakultas Hukum		370	8	- Ruang Kuliah	
			Faculty of Law				*Class Room*	
			- Keperdataan	S1, Sarmud			- Asrama Mahasiswa	
			Civil Code	*Bachelor*			*Student Dormitory*	
			- Kepidanaan				- Perpustakaan	Sarmud - 475
			Criminal Code				*Library*	*Bachelor*
			FISIP :		886	14	- Ruang kuliah	Sarjana - 95
			Faculty of Social and Political				*Class Room*	*Graduate 95*
			Science					
			- Ilmu Adm. Negara	S1, Sarmud			- Asrama Mahasiswa	
			Public Administration Science	*Bachelor*			*Student Dormitory*	
			- Ekonomi/*Economics*	S1, Sarmud			- Perpustakaan	
				Bachelor			*Library*	
			- Antropologi/*Anthoroplogy*	SO, S1				
			Fakultas Pertanian :		434	21	- Ruang kuliah/*Class Room*	
			Faculty of Agricultural					
			- Pertanian/ *Agricultural Dept.*				- Laboratorium/*Laboratory*	Sarmud - 146/*Bachelor*
			- Peternakan	S1			- Kebun Percobaan	Sarjana - 52
			Cattle Breeding Department				*Demonstration plot*	*Graduate*
			- Kehutanan/*Forestry*				- Asrama Mahasiswa	
							Student Dormitory	
							- Perpustakaan/*Library*	
2.	Akademi Pemerintahan	Daerah	- Pemerintahan	Sarjana Muda	154	7	- Ruang Kuliah	Sarmud - 480
	Dalam Negeri Th 1968						- Asrama Mahasiswa	
	Home Affairs Ad-	*Regional*	*Administrative Affairs*	*Bachelorate*			*Student Dormitory*	
	ministration Academy 1986							
							- Perpustakaan/*Library*	
3.	AIA & A YAPIS	Swasta	- Jurusan Adm. Negara	Sarjana Muda		6(41)	- Ruang Kuliah	Sarmud - 89
	Tahun 1974	Terdaftar	- Jurusan Akuntansi				*Class Room*	Sarmud - 26
	Administration & Account-	*Private*	*State Administration*	*Bachelorate*			- Perpustakaan	*Bachelor*
	ing Academy of YAPIS,	*Registered*	*Department*				*Library*	
	1974		*Accounting Dept.*					
4.	STT Katholik	Swasta	- Jurusan Teologi	Sarjana Muda	49	9(9)	- Ruang kuliah	Sarmud - 27
		Terdaftar	Kebudayaan	*Bachelorate*			*Class Room*	*Bachelor*
		Private	*Theology & Culture*					
	Tahun 1967	*Registered*	*Department*				- Asrama Mahasiswa	
				Bachelorate			*Student Dormitory*	
							- Perumahan pegawai/	
							Official Houses	
5.	STT GKI Tahun 1970	Swasta	- Jurusan Teologi	Sarjana Muda	56	6(8)	- Ruang kuliah	Sarmud - 175
	Indonesian Catholic Church	Ijin operasi	*Theology Department*	*Bachelorate*			*Class Room*	*Bachelor*
	Theology Institute 1970	*Private*						
		Operational					- Asrama Mahasiswa	
		permit					*Student Dormitory*	
							- Perumahan pegawai	
							Official Houses	
6.	STIE Ottow - Geissler	Swasta Eva-	- Jurusan Ekonomi	Sarjana Muda	300	5(24)	- Ruang kuliah	
	Tahun 1981	luasi kopertis					*Class Room*	
	Ottow-Geissler Economics	*Private*	*Economies Faculty*	*Bachelorate*			- Perpustakaan	*Buchelor*
	Institute 1981	*Kopertis's*					*Library*	
		Evaluation						
7.	STIA Biak	Swasta	- Jurusan Adm. Negara	Sarjana Muda				
	Administration Science	*Private*	*State Administration*	*Bachelorate*				
	Institute of Biak		*Department*					
8.	STIA Sorong	Swasta	- Jurusan Adm. Negara	Sarjana Muda				
	Administration Science	*Private*	*State Administration*	*Bachelorate*				
	Institute of Sorong		*Department*					
9.	STIH	Swasta	- Jurusan Hukum					
	Institute of Law	*Private*	*Law Affairs*					

Sumber : BAK Uncen.
Source : Bureau of Personnel Administration of Cendrawasih University

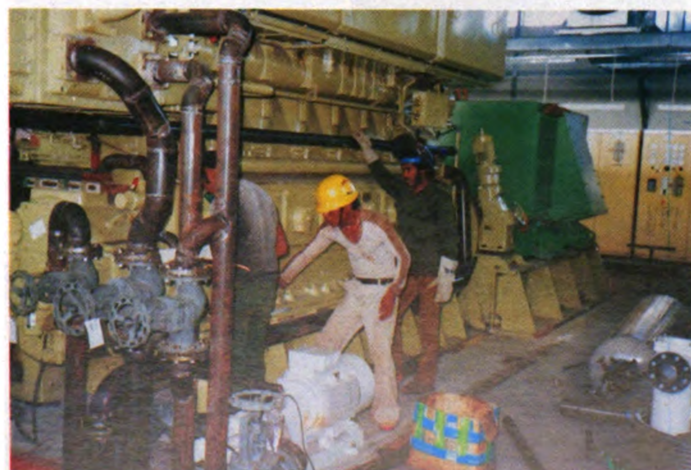


Daya serap pembangunan sektor pekerjaan umum terhadap kebutuhan tenaga kerja di Propinsi Irian Jaya dirasakan cukup menonjol. Dalam kaitan inilah, Pemerintah Daerah setempat terus mengusahakan agar lapangan kerja pada sektor tersebut tetap tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Apalagi masyarakat Irian Jaya dikenal mempunyai hasrat yang tinggi untuk maju dan senantiasa berkeinginan untuk belajar. Faktor seperti itu sangat mendukung kemajuan daerah.

The capacity of public work development to absorb manpower in Irian Jaya is considerably outstanding. In view of this potential, the Regional Administration has taken an initiative to always encourage this sector to extend employment opportunity to the people, while the people of Irian Jaya have strong will to learn and to progress. Such factors will naturally be conducive to the progress of the region.





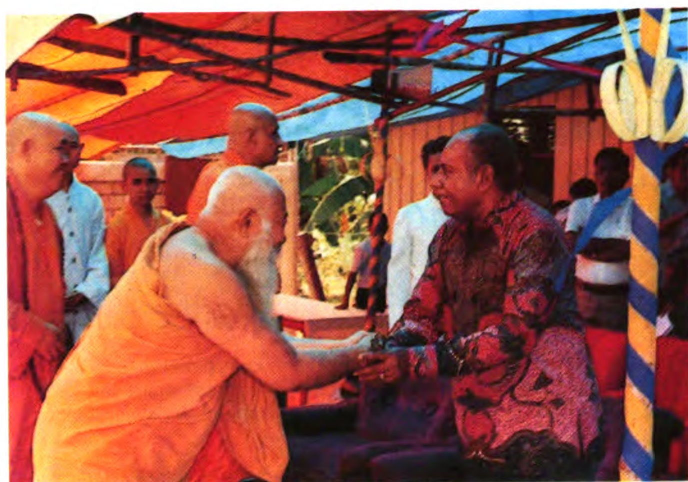




Perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sektor agama di Irian Jaya amat besar. Berbagai bentuk upacara keagamaan misalnya, dilaksanakan secara baik dan khitmad. Pemberian fasilitas berupa gedung tempat beribadah juga terus berkembang. Belum lagi bantuan berupa uang kepada Uskup yang dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang segar bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama seperti nampak dalam gambar.

The Regional Administration of Irian Jaya Province gives serious attention to the development of religious sector. Numerous kinds of religious ceremonies are organized solemnly and full of tolerance. Houses of worships are built, and financial aid is given to bishops to create a favourable climate so that the religious life can properly thrive as reflected on the picture.















Jika pulau Jawa sudah mampu membuktikan diri sebagai penghasil padi, barangkali salah satu faktor penunjangnya ialah keadaan tanahnya yang memungkinkan. Tetapi bagaimana dengan Irian Jaya yang nyatanya bukan hanya padi, tetapi kopi dan jagung bisa tumbuh subur sebagaimana nampak dalam gambar. Sungguh, suatu prestasi yang patut digarisbawahi.

No doubt that Java island has proved itself as rice producer since its land, the vital supporting factor, has made it possible. As a matter a fact, Irian Jaya, with its own typical condition, has also been able to make rice as well as coffee and corn to prosperously grow as shown on the pictures. An impressive prestige that needs to be underlined.









Gedung Bank Ekspor Impor Indonesia, Stasiun Pemancar RRI Biak dan sarana komunikasi lainnya nampak selalu siap melaksanakan bidang tugasnya masing-masing. Sarana penunjang ini cukup besar manfaatnya bagi terselenggaranya pembangunan di Daerah Tingkat I Irian Jaya.

Indonesian Export-Import Bank, Transmitter Station of the Radio of Republic of Indonesia in Biak and other communication facilities are always ready to carry out their respective tasks. These supporting facilities prove to be useful to organize development in Irian Jaya Province.



Pendidikan dan ketrampilan pada dasarnya merupakan modal utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa, disamping faktor penunjang lainnya. Menyadari pentingnya masalah tersebut, pembangunan sektor pendidikan mendapatkan prioritas utama. Bahkan Gubernur Isaac Hindom pun sering terjun ke lapangan untuk memonitor pelaksanaannya.

Education and skill principally constitute the primary capital to reach the progress of a nation in addition to other supporting factors. Realizing the importance of this sector, the development of education is given high priority, while Governor Isaac Hindom himself frequently is checking on the spot to monitor the execution of education development.











Sarana perhubungan yang memadai pada gilirannya dapat meningkatkan pembangunan sektor ekonomi. Jembatan sebagai faktor penunjang sektor perhubungan, terus menerus mendapat perhatian yang serius dari Pemda.

Adequate communication facilities can, in due turn, promote the development of economic sector. Bridges as the supporting factors of communication sector continuously receive serious atention from the Regional Administration.

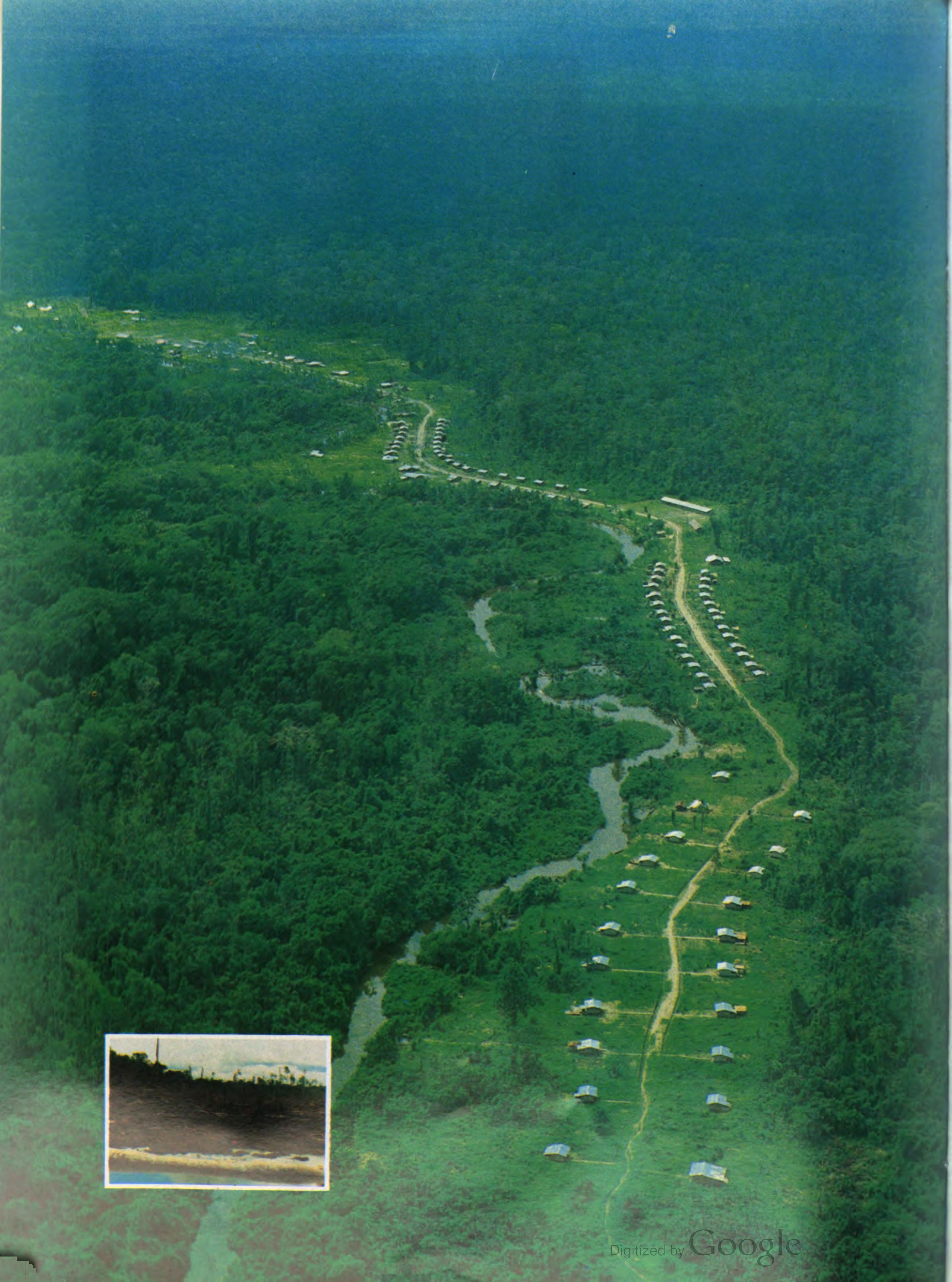


Flora dan Fauna di Irian Jaya merupakan salah satu kekayaan bumi yang patut dibanggakan. Komoditi kayu misalnya, juga dihasilkan dari kekayaan tersebut. Bahkan hasil hutan jenis ini mampu berbicara di tingkat nasional.
Sementara halaman berikut memperlihatkan kehijauan hutan di Irja. Diharapkan dalam mendaya-gunakan hasil hutan, mengikuti petunjuk Instansi Pemerintah yang terkait. Untuk menghindarkan penggundulan hutan (inzet).

Irian Jaya Province can be proud of its rich flora and fauna. Wood commodity, for instance, is obtained from this property, and even this commodity has been able to be marketed internationally.
Pictures on the next page illustrate the lush green vegetation in Irian Jaya. The exploitation of forest products in an integrated and proper way as regulated by the Forestry Office, will certainly avoid the damage of forest as well as living environment.







juga digunakan sebagai suasana atau ilustrasi dari suasana emosi yang diungkapkan oleh si pelakon.

Ukiran Suku Asmat

Berbicara tentang Irian Jaya tidak akan lengkap kalau tidak bicara tentang suku Asmat di Irian Jaya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suku di Irian Jaya cukup banyak dan ratusan jumlahnya demikian juga bahasanya. Suku Asmat adalah salah satu dari suku di Irian Jaya cukup banyak dan ratusan jumlahnya demikian juga penduduk Irian Jaya. Suku ini mempunyai kelebihan dari suku-suku lainnnya di Irian Jaya, karena keahliannya dalam bidang pembuatan/ukiran, yang sangat khas. Ukiran-ukiran suku Asmat ini sudah tidak asing lagi di Indonesia maupun di masyarakat Internasional. Sebab tidak sedikit ukir-ukiran suku Asmat yang sudah keluar dari Irian Jaya dibawa oleh turis-turis baik domestik dan asing. Ada juga yang sengaja dibawa oleh pedagang-pedagang untuk mengisi toko-toko kerajinan baik di daratan Irian Jaya maupun di kota besar di Indonesia. Lewatan pahatan kayu orang Asmat menyatakan ungkapan hubungan yang masih menyatu antara mereka yang sudah tiada dengan mereka yang masih hidup. Dalam patung yang kelihatannya seperti orang tumpang tindih disusun secara teratur memberikan gambaran bagi mereka yang sudah tiada, baik itu leluhur, keluarga atau teman sejati bahkan binatangpun.

Pada waktu sering terjadi perang antar suku/desa di daerah itu, kehadiran Mbis (patung yang terdiri dari tonggak kayu yang tingginya kurang lebih 3 meter, terdiri dari ukiran arwah-arwah yang terdahulu), pada saat mulai mengadakan penyerangan kedesa lain, memberikan daya magis/semangat tempur yang sangat kuat. Seakan-akan mereka siap untuk menuntut balas atas kematian keluarga, teman perang sebelumnya.

Perkembangannya sekarang ini berkat adanya bimbingan dari Pemerintah pusat dan daerah dan bimbingan dari misi-misi keagamaan yang selalu memberikan bimbingan mental spiritual kepada mereka, perang antar desa atau suku tidak pernah terdengar lagi. Tetapi keahlian suku Asmat dalam pembuatan patung makin hari makin bertambah maju dan halus. Dalam hal ini ada dua faktor yang mendorong suku Asmat untuk mengembangkan kerajinannya yaitu :

a. Adanya bimbingan dari Pemerintah yang selalu memberikan pengarahan dan peralatan yang lebih bagus dari sebelumnya kepada Wow Ipits (pengrajin patung yang sudah profesional);
b. Derasnya pemasaran hasil kerajinan mereka ke pasaran, memberikan rangsangan tersendiri kepada Wow Ipits untuk membuat ukiran yang lebih baik lagi.

Suku Asmat mempunyai beberapa upacara sebagai penghormatan kepada roh-roh leluhur atau kekuatan gaib, diantaranya :

1. Pirpokmbuy, yakni upacara pengambilan sagu;
2. Ndatpokbuy, upacara topeng roh-roh;
3. Cipokmbuy, upacara meluncurkan perahu;
4. Mbispokmbuy, upacara memulai memahat patung a Mbis.

Kecamatan Asmat, merupakan bagian dari Kabupaten Merauke, letaknya di sebelah barat daya dari kota Jayapura. Ketempat itu dapat dicapai dengan pesawat kecil yang biasa mendarat di Basien. Karena kecilnya, lapangan ini dapat dikatakan lapangan bola. Ibukota Kecamatan Asmat, adalah Agats. Lebih cocok dengan sebuah desa dengan beberapa ribu penduduknya yang sudah bercampur aduk, antara lain : Ambon, Jawa, Bugis dan beberapa orang Asing (Amerika) sebagai misi Katholik. Di Agats, bercampur penduduk asli (Asmat) dengan pendatang dari luar daerah bahkan dari luar negeri.

Jalan-jalan di Asmat merupakan jalan jembatan kayu yang dibangun sedemikian panjang dan sambung menyambung satu desa dengan yang lainnya. Kanan-kiri jalan tumbuh pohon sagu dengan suburnya yang merupakan sumber bahan pokok pangan dari suku Asmat. Pertanian di daerah itu seperti tidak pernah dipikirkan orang, karena medannya sangat begitu sulit.

Kawasan Asmat merupakan daerah terpencil, yang hampir seluruhnya terdiri dari hutan belantara berawa-rawa membentang luas sampai berbatasan dengan Arafura. Di antara tepian laut dan sungai itulah kurang lebih 30.000 orang suku Asmat bertempat dan bertebaran di beberapa desa. Meskipun demikian berkat kemampuan suku Asmat yang khas dalam pembuatan ukiran yang terkenal primitif, nama Asmat tidak saja terkenal di Indonesia tetapi sampai ke luar negeri.

3. Pendidikan Generasi Muda dan Olah Raga

Kegiatan pembinaan Generasi Muda dilaksanakan melalui berbagai cara seperti melalui kegiatan kepramukaan, Pembinaan Pemuda oleh Kanwil Depdikbud dan Kegiatan pembinaan oleh Kanwil Departemen Sosial Irian Jaya.

one can see the moral of this legend. There is the heroic gesture of the leader, the chief to the tribe, who accepts his failures; the princess although the daughter of the chief, who accepted punishment to her wrongdoings, which has dishonoured her family and tribe.

This legend tells us that Irian Jaya, since a long time ago, has had specific governmental order. Their people honour traditional norms in the moral conduct, just like their brothers and sisters from the other parts of the country.

When performing the ballet of "Mambaiseng" the musical instruments accompanying the play consisted of traditional instruments such as the tifa which is made of bamboo, the triton which is a sport trumpet made of molusca shell, small gong, the bamboo flute, the ankilka which is made of bamboo or the husk of a gourd, and the canoe-shaped kelambut. Since this sort playdance is carried out in the ballet style, the musical accompaniment cannot be left out. As a consequence, when performing this art thre would be a performing stage and another one for the musicians.

The Asmat Carvings

Speaking about Irian Jaya would not be complete when the Asmat tribe is not included. As mentioned before, the inhabitants of Irian Jaya form a great number of people and they differ from each other in language, religion, stature, intelectual development and ways of life. The Asmats have one special advantage from the other tribes, which is their skills in carving specific sculptures. Their works are at the moment already renown in Indonesia as well as abroad since it has found its way through local and foreign tourists to places away from Irian Jaya. There are also quite a number of the Asmat carvings which were purchased for merchandise purpose to be resold in giftshops. Their woodcarvings mostly illustrate the strong relation between the living Asmats and their ancestors. It will come in poles of about three meters high on which area carved images of human beings from the top to the bottom of the pole. They are supposed to be their long-departed forefathers, but when a tribal war broke out, this Mbis statute will give the Asmats spiritual strength to help them win the war. It will make them believe that they are fighting as a revanche to the death of their forefathers.

At present, the national and local governments together with the religious leaders have succeeded to guide and lead the various tribes in Irian Jaya to develop their tribes and drop their tradition of tribal warrings.

As to te expertise in woodcarvings by the Asmat people the government is giving fully support to improvement and promotion, by way of :

a. Providing guidance and sophisticated carving tools to their Wow Ipits (the professional woodcarvers),
b. Encouraging the marketing of their products.

The Asmat people have various traditional ceremonies as homage to their ancestors, among others.

1. Pirpokmbuy, a ceremony when harvesting their staple diet the sago,
2. Ndatpokbay, a ceremony wearing the masks of the spirits,
3. Cipokmbuy, a ceremony when launching a boat,
4. Mbispokmbuy, a ceremony when starting to make the statue of a Mbis.

The Sub-ditrict of Asmat, of the District of Merauke, is located northwest of Jayapura, the capital city of the province. It has a very small air-field, almost as big as a football field, called Basien, and the capital town is Agats. In fact, this Agats town is more like a village with multirasial inhabitants like the Ambonese, Javanese, Buginese and a number of American Catholic missionaries, who are in very good relations with the local Asmat people. Very long wooden bridges connect one Asmat village with the other and along the sides of the little available roads sago trees grow in abundances. Since the Asmats never thought of any other cultivation activities.

The Asmat territory is isolated and located in swampy forest area which almost covers the entire area until the borders of Arafura. The Asmat tribe inhabits the terrain between the coastline and th river and these apporximately 30,000 tribes people reside in a number of villages. In spite of their poor environment the Asmat people are known not only all over Indonesia, but even abroad for their traditional woodcarvings of the Asmat sculpture.

3. Young Generation Education and Sports

Activities in guiding the Young Generation is carried out through Pramuka (Indonesia's Scouts Movement), Youth counselling by the Regional office of the Department of Education and Culture and also that of the Department of Social Affairs, both in the province of Irian Jaya.

a. Youth Affairs

Pramuka movement in Irian Jaya is nationally recognised and has taken part in efforts of the government as well as the community at large concerning matters on socioculture and education, ecnomy, national resilience and others.

In the province of Irian Jaya activities of the Pramuka is directed towards quality improvement of its members to prepare them for future tasks in guiding their fellow youth and to be able to parkate in the national as well as international activities. *See Table IV – 12.*

a. Kepemudaan

Gerakan Pramuka di Irian Jaya selama ini telah mendapat tempat dan kepercayaan untuk berperan serta dalam usaha-usaha yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dibidang sosial budaya dan pendidikan, ekonomi dan ketahanan nasional dan sebagainya. Lihat Tabel IV-12.

Kegiatan kepramukaan di Irian Jaya dititik beratkan kepada penggalangan dan peningkatan mutu para anggota yang diharapkan dapat diandalkan dalam menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara bertanggung jawab. Selain ditingkat Propinsi, maka kegiatan daerah juga digalakkan dan sekaligus menghadapi kegiatan tingkat Nasional dan internasional.

Kegiatan di tingkat daerah dalam tahun 1979 Kwarda mengadakan lomba tingkat IV (Lt IV) Penggalang yang diikuti oleh utusan-utusan penggalang dari Kwarcab se Irian Jaya. Lomba seperti ini dilaksanakan untuk seleksi dalam mengikuti LT V di tingkat Nasional. Mengikuti Jambore daerah di Jayapura yang diikuti oleh semua Kwarcab se Irian Jaya. dalam tahun 1982 diadakan musyawarah daerah. Dalam Musda 1982 ini sekaligus terpilih pengurus daerah masa bakti 1983-1987. Bekerjasama dengan BP-7 Propinsi Irian Jaya mengadakan Penataran P4 sebanyak dua angkatan untuk Pramuka Penegak dan Pendega. Tahun 1983 juga diadakan pelantikan majelis pembimbing daerah oleh Kwarnas, dan pelantikan pengurus daerah (Kwarda) masa bakti 1983-1987. Dan dalam tahun 1983 di Jayapura diadakan Raimuna Daerah yang pertama diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pendega utusan-utusan Kwarcab se Irian Jaya.

Sedangkan pembinaan Generasi Muda oleh Kanwil Departemen Sosial melalui pembentukan wadah Karang Taruna yang berada di Desa-desa di 9 Kabupaten Irian Jaya yang perkembangannya cukup menggembirakan. Lihat Tabel IV-13 dan IV-14.

b. Olah Raga

Daerah Irian Jaya mempunyai potensi menonjol di bidang olah raga. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil yang dicapai oleh olah ragawan Irian Jaya baik di forum nasional maupun internasional. Prestasi tersebut dapat dicapai berkat adanya faktor-faktor penunjang yang memadai, seperti : adanya kegemaran rakyat melakukan olah raga dengan bakat-bakat alamnya, kondisi fisik individual yang menonjol, adanya pembinaan yang cukup baik dan disertai dana dari Pemerintah Daerah yang cukup. Yang merupakan tantangan bagi KONI Daerah Tingkat I Irian Jaya ialah bagaimana prestasi yang telah dicapai itu harus dipertahankan disamping usaha yang terus menerus untuk selalu meningkatkan prestasi dengan pembinaan bibit-bibit olah ragawan berkat secara berkesinambungan.

Seperti daerah-daerah lain olah raga di Irian Jaya mempunyai klub-klub. Klub-klub dihimpun dalam wadah top organisas, selanjutnya top organisasi yang merupakan induk organisasi tertinggi di tingkat Daerah Tingkat II maupun Daerah Tingkat I terhimpun di dalam wadah KONI. KONI Daerah Tingkat I Irian Jaya dibentuk pada tahun 1967, dan KONI Daerah Tingkat II se-Irian Jaya dibentuk pada tahun 1978. Irian Jaya mengikuti Pekan Olah Raga pertama kali yaitu pada Porwil Irama Suka I Tahun 1967 yang berlangsung di Ambon. Selanjutnya sejak PON IX Tahun 1969 di Surabaya sd PON X Tahun 1981 di Jakarta, Irian Jaya tak pernah absen dalam pertandingan-pertandingan tingkat Nasional khususnya yang diselenggarakan oleh masing-masing induk organisasi Nasional. Pada PON VII Tahun 1969 di Surabaya medali yang diperoleh : 1 emas, 1 perak, dengan ranking 17, maka pada PON X Tahun 1981 di Jakarta medali yang diperoleh 13 emas, 24 perak dan 19 perunggu dan menduduki ranking 7.

Untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai, meningkatkan prestasi yang optimal diwaktu yang akan datang dan membina bibit-bibit baru, arah pembinaan olah raga, arti luas KONI Irian Jaya sudah menyusun program pembinaan yang cukup mantap, terarah dan terpadu dengan sarana utama adalah PON XI Tahun 1985, diharapkan mencapai ranking yang lebih tinggi dari PON X yang lalu. KONI Daerah Tingkat I Irian Jaya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI dan Penggarisan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, yang merupakan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya di bidang pembangunan olah raga maka dirumuskan tugas pokok KONI Daerah Tingkat I Irian Jaya adalah : "Membina dan mengendalikan olah raga serta mengolah ragakan seluruh rakyat di Propinsi Irian Jaya untuk membentuk manusia Indonesia yang Pancasilais sejati, yang tegap fisik maupun mental, menjunjung tinggi kebesaran dan kehormatan bangsa dan negara, ikut menanamkan kesadaran dan kebiasan berolah raga pada segenal rakyat Indonesia, ikut mempertinggi mutu dan prestasi olah raga Indonesia menuju ketahanan nasional, dan ikut memupuk persahabatan dan perdamaian dunia".

Untuk memberikan gambaran tentang penunjang pembinaan prestasi olah raga dalam kelengkapan sarana/prasarana sebagai fasilitas

Tabel / *Table IV — 12*

KEADAAN PRAMUKA DI IRIAN JAYA TAHUN 1982 - 1983
PRAMUKA IN IRIAN JAYA IN 1982 - 1983

No	Peserta didik *Following Education*	Putri *Girls*	Putra *Boys*	Jumlah *Total*	Keterangan *Remarks*
1.	Siaga/*Browne*	4.873	8.015	12.888	
2.	Penggalang/ *Scout*	4.884	9.003	13.887	
3.	Penegak/*Ranger*	898	2.805	3.703	
4.	Pendega/ *Senior Ranger*	476	1.915	2.391	
	Jumlah / *Total*	11.141	21.735	32.879	

Sumber data : Kwarda Irian Jaya
Data Source : Regional Pramuka Quarters of Irian Jaya Province.

On the regional level, in 1979 the Regional Pramuka quarters has organised contests of Penggalang level IV which was participated by all Pramuka branches in the province. These contests are carried out for selections to the National level. In 1982 there has been the Regional level Conference which has chosen the 1983 - 1987 period board of leaders and in 1983 the Board of Counsellers of the region was in stalled by the National Pramuka Quarters for the period of 1983 - 1987. In 1983 also a local Jamboree (Raimuna Daerah) was held in Jayapura, which was participated by delegates from the branches of all over the province of Irian Jaya.

In cooparation with BP-7 (the Board to Promote Education Implementing the Guidance to the Perception and Practice of Pancasila), the Provincial Government of Irian Jaya has caried out courses on P-4 as much as two times for the Pramuka Penegak and Pendega.

As to the promotion of the Young Generation by the Regional office of the Department of Social Affairs, various activities have been carried out by the Karang Taruna (Young Centres) which has been established in villages of the nine districts of the Irian Jaya Province. See Tables IV – 13 and IV – 14

b. Sports

Irian Jaya is a potential area for the development of sports. This is obvious from the achievements of the Irian Jaya athletes in the National as well as International events. These achievements area made possible by several supporting factors such as the natural sports talent of the Irian Jaya people, their distinct individual physical condition, adequate promotion and coaching, and sufficient fundings by the Regional Administration. The Provincial level KONI (Indonesian National Sport Committee) is facing the challenge of retaining and improving the records of the local athletes and at the same time prepare and coach prospective athletes for the long run.

Like in the other provinces, Irian Jaya also has sports-clubs which are organised and belong to one top organisation of the district or provincial level which in turn conjoins with those from the other provinces on the National level of KONI. The provincial level KONI of Irian Jaya was established in 1967 and those on the district level in 1978. The first Sports Week participated by Irian Jaya was the "Porwil Irama Suka" (Regional Sports Week Irama Suka) in 1967 which was held in Ambon. Later on Irian Jaya continued to participate in the 7th National Sports Week (PON) in 1969 held in Surabaya, until the 10th PON in 1981 held in Jakarta. This province has been taking part in every National sport even especially those organised by each National level sports organisation. At the PON in Surabaya Irian Jaya won one gold and one silver medal at the 17th rank but then at the 1981 PON in Jakarta it moved up to the level with 13 gold, 24 silver and 19 bronze medals.

To keep up the achievemtns, improve the records to the maximum and promote new athelets, the direction of sports development was to make a better performance at the following sports events. In line with the statues and rules of the provincial level KONI and also measures by the Government of Irian Jaya Province which became the policy of the regional administration of Irian Jaya concerning the sports development, the main task of the provincial level KONI of Irian Jaya read: To foster and promote sports and to popularise sport among the people of Irian Jaya for a better Indonesian man, abiding to Pancasila principles, who will improve mentally and physically, respects his land and nation and feel responsible to guide the Indonesian people towards sports and exercises and make efforts to improve the quality and achievements of sports activites in Indonesian for the Sake of National resilience and helf foster friendship and peace in the world.

For this above mentioned purpose, supporting facilities and infrasutructures have been made available. See Table IV – 15

Tabel / *Table IV — 13*

PEMBINAAN PEMUDA YANG DILAKSANAKAN KANWIL DEPDIKBUD IRIAN JAYA TAHUN 1979/1980 S/D 1982/1983

YOUTH PROMOTION ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE REGIONAL OFFICE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF IRIAN JAYA PROVINCE DURING F.Y 1979/1980 - 1982/1983

No	Kegiatan *Activities*	79/80	80/81	81/82	82/83	Jumlah *Total*
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pembinaan Paskibraka dan Caraka Muda/ *Guidance of Paskibraka and Caraka Muda*	27	32	35	33	127 Orang
2.	Festifal Pemuda/*Youth Festival*	20	200	200	160	380 Orang
3.	Kelompok Minat Pemuda/ *Youth Group of Interests*	40	32	30	30	132 Orang
4.	Pembinaan Satgas/*Task Force Fostering*	100	150	-	-	250 Orang
5.	Kelompok kerja produktif/ *Productive Working Group*	-	-	100	10	110 Orang
6.	Latihan Pemuda Tingkat Perintis/ *Youth Training of Pioneer Level*	40	35	-	-	75 Orang
7.	Latihan penuntun/kader pemuda/ *Guiding Training/Youth Cadre*	40	80	-	43	163 Orang
8.	Penataran penilik PGM/ *Upgrading of inspectors of Youth Generation Promotion*	-	-	-	28	28 Orang
9.	Kelompok kejar usaha/ *Studying group of puny enterpreneuers*	-	-	100	230	330 Orang
10.	Pertukaran pemuda antar Propinsi/ *Inter-Regional Youth Exchange*	21	-	-	-	21 Orang
11.	Perkemahan kerja pemuda/ *Youth's Working Camping Ground*	-	-	-	24	24 Orang
12.	P4 Pemuda/*Guide to Enlightenment and Application of Pancasila Course of Youth*	-	-	-	32	32 Orang
13.	OSIS/*Organisation of Inter School Students*					
	a. Penataran tata upacara bendera/ *Flag hoisting ceremony order*	-	-	-	-	-
	b. Pengiriman peserta penataran pembina Osis Tingkat Nasional *Sending participation of national level OSIS guiding course*	-	-	-	-	-
	c. Pemilihan Paskibraka/ *Selection of "Paskibraka" squad*	22	2	2	2	28 Orang
	d. Pemilihan Siswa teladan Tk. Nasional/ *Selection of model students*	1	1	1	2	5 orang
14.	Program kapal Pemuda Asia Tenggara/ *Southeast's Youth Ship Journey Programme*	1	1	-	1	3 Orang
15.	Program pertukaran Pemuda dengan Kanada/ *Irian Jaya - Canada Youth Exchange Programme*	1	1	1	1	4 Orang
16.	Pembangunan sarana/*Means Development*					
	a. Lembaga Cadika (Pramuka)/ *Scouting Training Institution*	-	1	-	-	1 Buah
	b. Gelanggang Remaja/*Youth Centre*	-	-	1	-	1 Buah
17.	Latihan Pemuka/*Boy scout training*	40	30	18	13	101 Orang

Sumber data : Bidang PGM Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya

Data Source : Division of Youth Generation Promotion of the Regional Office of the Department of Education and Culture.

Note : Paskibraka is National Flag Hoisters Squad designed to hoist national flag on the occasion of commemorating independence day.

pembinaan menuju peningkatan prestasi dapat dikemukakan. Lihat Tabel IV-15.

4. Kesehatan dan Keluarga Berencana

a. Kesehatan

Sektor Kesehatan merupakan salah satu faktor prioritas dalam pembangunan di daerah Irian Jaya. Hal ini didasarkan pada masih rendahnya status kesehatan penduduk di Irian Jaya sebagai akibat dari kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, kurangnya pengertian tentang kesehatan, kurang gizi, kesehatan lingkungan yang buruk dan masih merajalelanya berbagai penyakit menular.

Upaya kesehatan yang ditempuh dalam meningkatkan status kesehatan ini ialah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu yang menjadi sasaran pembangunan di sektor kesehatan ini pada umumya adalah upaya meningkatkan dan meratakan cakupan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan di Irian Jaya. Secara khusus pelayanan kesehatan diprioritaskan ke daerah yang terpencil, daerah perbatasan, transmigrasi dan daerah pemukiman baru yang dilaksanakan secara merata sehingga sasaran yang dicapai dapat mempengaruhi tujuan antara program maupun antar sektor terutama meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan ketahanan nasional.

4. Health and Family Planning

a. Health

The sector of Health constitutes one of the priority sectors in the development of Irian Jaya Province. This is in answer to the poor status of health of the population of this region as the result of being poor, economic backwardness, lack of awareness concerning health, manultrition, bad environmental hygiene and the ragings of epidemics.

To improve the health condition of the people in Irian Jaya, the development target in the Health sector is in general to increase and equally distributed health services to the population up to the sub-districts of this province. In particular the health service are for the priority of the remote areas, borders, transmigration areas and newly opened settlements. The services area carried out equally so that its results may bring effect to promote the society's economic and social condition together with the national resilience.

Development activities in thei shealth sector is also aimed at improving the socio-economic life for the optimum health condition of each citizen. In its efforts to reach the goal, from year to year the Government has enhanced the development of health facilities by providing Public Health Centres and Health Clinics in the region. At the momen almost each sub-district of Irian Jaya province has health facilities.

During Pelita I — III besides providing physical means and infrastructure, priority has also been put on narrowing the mortality rate caused by various contagious diseases, such as malaria. Attempts to eradicate malaria has not turned out well.

Tabel / *Table IV — 14*

PEMBINAAN PEMUDA OLEH DEPSOS DI IRIAN JAYA
YOUTH PROMOTION BY THE REGIONAL OFFICE OF DEPARTMENT OF SOCIAL AFFAIRS OF IRIAN JAYA PROVINCE

No	Kabupaten *District*	Jumlah Desa *Number of Village*	Jumlah Karang Taruna *Number of Youth Organisation*	Jumlah Anggota *Number of Member*
1.	Jayapura	27	27	968
2.	Teluk Cenderawasih	8	8	114
3.	Yapen Waropen	3	3	126
4.	Manokwari	4	4	426
5.	Sorong	2	3	*)
6.	Fak-Fak	12	12	57
7.	Merauke	6	6	*)
8.	Jayawijaya	6	6	*)
9.	Paniai	4	4	287

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984.
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984
*) Jumlah anggota belum masuk / *Data not yet available.*

Tabel / *Table IV — 15*

JUMLAH DAN MACAM SARANA OLAH RAGA DI IRIAN JAYA
NUMBER AND KINDS OF SPORTS FACILITIES IN IRIAN JAYA

No	Macam *Kinds*	Jumlah *Total*	Keterangan *Remarks*
1	2	3	4
1.	Stadion/*Stadiums*	3	3 Kabupaten/*Districts*
2.	Kolam Renang/*Swimming Pools*	3	2 Kabupaten/*District*
3.	Gedung Olah Raga/*Sport Hall*	1	di Jayapura
4.	Gedung Khusus Olahraga Angkat Besi/ *Weight lifting Hall*	1	di Jayapura
5.	Lapangan Sepak Bola/*Football field*	72	9 Kabupaten/*District*
6.	Lapangan Bola Volley/ *Volleyball field*	188	9 Kabupaten/ *Districts*
7.	Lapangan Tennis/*Tennis courts*	47	9 Kabupaten/*Districts*
8.	Lapangan Basket/*Basketball halls*	38	9 Kabupaten/*District*
9.	Lapangan Atletik *)/ *Athletics Track & Field*	2	2 Kabupaten/ *Districts*
10.	Lapangan Menembak/*Shooting range*	3	2 Kabupaten/*Districts*
11.	Lapangan Golf/*Golf Course*	1	di Jayapura
12.	Lapangan Bulu Tangkis (tertutup)/ *Indoors Badminton Fields*	15	9 Kabupaten/ *Districts*
13.	Lapangan Yudo/*Judo Platform*	1	di Jayapura
14.	Lapangan Gulat/*Wresting Ground*	1	di Jayapura
15.	Lapangan Panahan/*Archery Range*	3	3 Kabupaten/*Districts*
16.	Pemusatan Latihan/*Training Centre*	1	di Jayapura

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984
Source : Monograph of Irian Jaya, 1984.
*) Yang ada lintasan larinya.

Kegiatan pembangunan di sektor kesehatan juga ditujukan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan mengusahakan agar setiap warga negara memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat semakin meningkat. Pemerintah dari tahun ke tahun telah meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dengan mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan di daerah. Kini hampir di setiap Kecamatan di Irian Jaya telah memiliki fasilitas kesehatan.

Dalam Pelita I - III disamping berusaha untuk mempersiapkan sarana dan prasarana fisik di sektor kesehatan ini juga prioritas utama adalah untuk mencegah angka kematian akibat masih banyaknya jenis-jenis penyakit yang segera mungkin dibatasi ruang geraknya. Seperti halnya penyakit malaria yang paling banyak diderita oleh rakyat di Irian Jaya. Sedangkan upaya pemberantasan malaria ini masih belum memuaskan.

Sasaran pembangunan sektor kesehatan di Irian Jaya dalam Pelita III dan Pelita IV adalah meningkatkan dan memeratakan cakupan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Kecamatan Irian Jaya, yaitu peningkatan gizi masyarakat melalui usaha perbaikan gizi keluarga di 120 Desa dalam 30 Kecamatan. Peningkatan gizi anak sekolah dilaksanakan di 22 Kecamatan di seluruh Propinsi sedangkan pelayanan gizi institusi dilaksanakan di 9 Rumah Sakit Umum dan 32 asrama dan panti.

Penyuntikan untuk penyembuhan gondok endemi dengan jodium dalam minyak dilaksanakan di 19 Kecamatan dan 4 Kabupaten termasuk penanggulangan vitamin A dan kebutaan diadakan di 37 desa dalam 4 Kecamatan Kabupaten Tingkat II Biak Numfor.

The target of the health sector development in Irian Jaya for Pelita III and IV is to enhance and equally provide health service to the communities in the sub-districts by improving the nutrition of families in 120 villages of 30 sub-districts. Nutrition improvement of school children is exercises in 22 sub-districts throughout the province while institutional nutrition improvement is carried out in 9 general hospitals and 32 dormitories and homes of the deprived.

Injections of jodire solution for the treatment of endemic thyroid is practiced in 19 subdistricts of 4 districts together with efforts to cope with the shortage of vitamin A and blindness in 37 villages of four sub-districts in the Biak Numfor district.

Improvements of health services is done in 25 Puskesmas (Public Health Centre) and 320 auxiliary Puskesmas in transmigration and other new dwelling areas. Ten Public Health Centres with ten beds for hospitalizations have been constructed and rehabilitations of auxiliary centres, Public Health Centres, housing complexes for doctors and health personnel hase been constantly carried out. The number of Puskesmas which is managed by a doctor has been increased to 65 while the rest will be supervised by diploma holders and health inspectors. In the framwork of nutritious health improvement, 80 nutrition restoration centres have been built. For the promotion of efforts for referential health services, the General Hospitals of Jayapura will be continuously improved, the General Hospital Sorong, Biak and Merauke promoted to Type C hospitals and the other hospitals Type D. Asylums will also be rehabilitated and its range and quality of services improved with various media and ways. The Government will wstablish 17 new intensive work areas and promote the existing 63.

Prevention and eradication of contagious disease will be improved with according to the following priorities: 1. Malaria, 2. Diarrhoea and vomiting 3. Immunisaitons. 4. Tuber culosis, 5. Dengue haemorrhage, 6. Frambusia 7. Elephantiasis, 8. Leprosy, 9. Worms, 10. Anthrak.

The eradication of malaria will be expanded to West Mimika and Akimuga in the district of Fak-Fak; four new sub-districts in Sorong, four in Jayawijaya, threen in Biak Numfor, two in Yapen Waropen, Five in Jayapura, two in Paniai, four in Manokwari and four new sub-districts in Merauke. This effort is realised in parallel with the increase of clean water supply and environmental hygiene. Waterpipes will be in stalled in 16 places, together with the provision of 48 springwater protectors, 1889 rainwater reservoirs, 6,200 pumpwells and 38 artesian wells. For environmental hygiene purposes the government will provide 28,000 family toilets and 5,000 sewers. As to the s upervision of medicine, food, beverage, cosmetics and chemicals, it will be increased with inspections and counsellings.

Efforts in preparing the necessary personnel to support the health programme is among others carried out by and addition of 60 doctors, 10 dentist, 11 chemists, 107 nurses, 97 maternity nurses, pediatric and surgery personnel, sanitation personnel, dental care nurses and chemistry analists. To cope with the shortage of personnel, two more nurses schools has been established, one school for dental care personnel, one for chemistry analists, one for hygiene assistant supervisers, 9 health courses, one Diploma programme in the field of maternity, paedietics and surgery and one Diploma III programme for healt counselling and nursing at Cenderawasih University have been institutionalised.

The programme of nutrition improvement in this province covers the family nutrition betterment endemic thyroid prevention. The main nutrition problem is that of protein shortage in the group age of under five-year-old children and the occurance of endemic thyroid in the mountain area, while the deficiency of Vitamin A is found in many places. KKP (Protein Shortage) among the under-five-year age group appears as many as 30 to 40 % in Paniai while those suffering from endemic thyroid are found in Paniai, Jayawijaya, Manokwari and Sorong, between 10 to 74 %. Efforts in promoting familty nutrition are carried out in 114 villages and 14 sub-districts in 4 Districts, to 6,876 children by establishing 1,143 consultation centres on nutrition.

With the increase of health facilities, especially with Inpres-Aid or Sarkes in the various areas, the range of health services has been more expanded than that of the previous year, in terms of extent as well as service. The numer of Regular Public Health Centres and the Inpres Public Health Centres in the 9 districts, according to the Provincial Statistc Office of Irian Jaya in 1985, was 27 Regular PUSKESMAS and 97 Inpres-Aid PUSKESMAS. Medical doctors consists of 7 Specialist, 87 Gneral Physicians and 13 Dentists totalling 117 medical doctors in this province, in 1985. This shows a very promising improvement when compared to the situation of 1981 when the doctors only totalled 88.

As to nurses in general, in 1985 the number reached 456, dental care nurses 13; those specialising in mentally disordered patients 17, totaling 470 nurses. The number of midwives reached 139. The progress of nurses and midwives in this region did not happen evenly by nursing specialities for example the general nurses, mental care nurses and dental care nurses increased by 14 persons in 1981 which rose to 25 in 1983 and declined to 13 in 1985.

Peningkatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui 25 Puskesmas dan 320 Puskesmas Pembantu yang baru di daerah transmigrasi dan di daerah pemukiman. Juga dibangun 10 buah Puskesmas dengan tempat perawatan 10 tempat tidur, rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Dokter, Staf Puskesmas dan tempat-tempat perawatan Puskesmas terus diadakan.

Puskesmas yang dipimpin dokter terus ditingkatkan menjadi 65, sedangkan sisanya akan dipimpin oleh lulusan diploma dan penyuluh/perawatan kesehatan. Dalam rangka pelayanan kesehatan gizi dibangun 30 buah balai pengobatan gizi. Dalam rangka peningkatan pelayanan rujukan, RSU Jayapura akan terus ditingkatkan, RSU Sorong, Biak dan Merauke menjadi RSU type C sedangkan RSU yang lain akan menjadi type D rumah sakit jiwa akan direhabilitasi dan diusahakan menjadi UPT Departemen Kesehatan. Jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan dengan menggunakan berbagai cara dan media. Akan dibuka 17 buah daerah kerja intensif baru serta pembinaan 63 buah daerah kerja lama.

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular terus ditingkatkan dengan urusan prioritas : 1. Malaria, 2. Muntah berak, 3. Imunisasi, 4. Tuberkulosa, 5. Demam berdarah, 6. Prambusia, 7. Filariasis (kaki gajah), 8. Kusta (lepra), 9. Penyakit cacing dan 10. Anthrak.

Sektor pemberantasan malaria akan diperluas ke Mimika Barat dan Akimuga di Kabupaten Fak-Fak; 4 Kecamatan baru di Sorong, 4 Kecamatan baru di Jayawijaya, 3 Kecamatan baru di Biak Numfor, 2 Kecamatan baru di Yapen Waropen, 5 Kecamatan baru di Jayapura, 2 Kecamatan baru di Paniai, 4 Kecamatan baru di Manokwari dan 4 Kecamatan baru di Merauke, Usaha ini dikaitkan dengan peningkatan penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

Pembangunan dan penyediaan perpipaan di 16 lokasi, perlindungan mata air 48 buah, penampungan 1889 buah air hujan, penyediaan 6200 buah sumur pompa tangan dangkal dan dalam serta pompa hidran sebanyak 38 buah.

Dalam rangka penyehatan lingkungan pemukiman akan dibangun 28.000 buah jamban keluarga, sarana pembangunan air limbah sebanyak 5000 buah.

Peningkatan pengawasan obat, makanan, minuman, kosmetik dan bahan berbahaya akan terus ditingkatkan melalui pemeriksaan dan penyuluhan-penyuluhan.

Penyediaan tenaga yang tepat untuk menunjang program kesehatan sehingga akan ditambah lagi 60 dokter, 10 dokter gigi, 11 apotheker, 807 tenaga perawat kesehatan dan 97 tenaga perawat kesehatan dengan kemahiran dalam bidang kebidanan, kesehatan anak dan bedah, tenaga sanitasi, perawat gigi dan analisis kimia. Untuk menunjang kekurangan tenaga maka perlu dibangun lagi 2 (dua) buah sekolah perawat kesehatan, 1 (satu) buah sekolah pengatur rawat gigi, 1 (satu) buah sekolah menengah analisa kimia, 1 (satu) buah sekolah pembantu penilik hygiene, 9 kursus pekarya kesehatan, Program diploma 1 (satu) kemahiran perawatan kebidanan, kesehatan anak dan bedah, program diploma 3 penyuluhan/perawat kesehatan Universitas Cendrawasih akan terus dilaksanakan.

Program perbaikan gizi di Irian Jaya meliputi usaha perbaikan gizi keluarga dan pencegahan gondok endemik. Masalah gizi utama adalah kekurangan protein pada anak balita dan gondok endemik di daerah pegunungan tengah, sedang gejala defisiensi vitamin A dilaporkan beberapa tempat. KKP pada anak balita berkisar antara 30 - 42% terutama di daerah Paniai sedang gondok endemik di Paniai, Jayawijaya, Manokwari dan Sorong berprevalensi antara 10 - 74%. Usaha peningkatan gizi keluarga dilakukan di 114 desa dan di 14 Kecamatan dari 4 Kabupaten dan melayani cakupan pelayanan 6,876 anak dengan membentuk 1.143 kader gizi. Lihat Tabel IV-16, IV-17, IV-18 dan IV-19.

Dengan adanya penambahan sarana kesehatan khususnya melalui bantuan pembangunan Sarkes/Inpres di beberapa daerah menyebabkan jangkauan pelayanan dapat lebih luas dari tahun sebelumnya, baik jangkauan daerah maupun jangkauan jenis pelayanan. Banyaknya PUSKESMAS Biasa dan Inpres di Irian Jaya menurut Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya tahun 1985 di 9 Kabupaten meliputi Puskesmas biasa sebanyak 27 buah dan Puskesmas Inpres 27 buah. Sedangkan tenaga dokter yang melayani masyarakat terdiri dari Dokter ahli sebanyak 7 orang, Dokter Umum 97 orang, Dokter Gigi 13 orang. Jumlah seluruhnya dokter di Irian Jaya tahun 1985 sebanyak 117 orang. Hal ini sangat menggembirakan kalau dibandingkan keadaan tahun 1981 dimana dokter yang bekerja di 9 Kabupaten di Irian Jaya hanya 88 orang.

Demikian juga tenaga Perawat dan Bidan di Irian Jaya tahun 1985 yang bertugas di 9 Kabupaten. Perawat umum sebanyak 456 orang, Perawat gigi 13 orang. Perawat Jiwa sebanyak 17 orang. Jumlah seluruhnya sebanyak 470 orang, belum termasuk bidan yang jumlahnya 139 orang.

Perkembangan tenaga Perawat dan bidang di Irian Jaya tidak merata. Misalnya tenaga Perawat umum, Perawat jiwa dan Bidan setiap tahun

Public and private hospitals added up to 11 and 4 respectively in 1985 while the bed capacity stood at 1,142 and 130. There were also 9 Military Hospitals with a capacity of 416 beds. See Tables IV-16, IV-17, IV-18 and IV-19

Tabel / *Table IV — 16*

BANYAKNYA PUSKESMAS BIASA DAN INPRES DI IRIAN JAYA MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985
NUMBER OF REGULAR AND INPRES—AID PUBLIC HEALTH CENTRES IN IRIAN JAYA BY DISTRICT IN 1985

No.	Kabupaten *Districts*	Puskesmas *Public Health Centres* Biasa *Regular*	Puskesmas *Public Health Centres* Inpres *Presidential Instruction Aid*	Jumlah *Total*
1	2	3	4	5
1.	Merauke	4	15	19
2.	Jayawijaya	3	10	13
3.	Jayapura	5	18	23
4.	Paniai	2	16	18
5.	Fak-Fak	2	6	8
6.	Sorong	4	13	17
7.	Manokwari	4	8	12
8.	Yapen Waropen	1	5	6
9.	Biak Numfor	2	6	8
	Irian Jaya	27	97	124

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985.
Source : Irian Jaya in Figures, 1985.

b. Family planning.

If the main problem in population and family planning in other provinces except Irian Jaya is the big total population which keeps on increasing, in Irian Jaya on the contrary, the main problem is the scarcity of population if compared to the vastness of the area. This has caused a special problem in Population and Family planning programmes. The small total population, particularly in hinteraland which is still isolated and hard to be reached by any transport, has become challenge for the development in Irian Jaya.

The accumulation of Irian Jaya population in the hinterland is also followed by unfavourable social, economic and cultural level. Communication and transport are difficult and expensive due to the vastness of the area which makes the targets of population and family planning programmes are alsmost imposible to meet.

In efforts to overcome various challenges faced by Irian Jaya in the Population and Family Planning programmes, a strategic policy has been taken among others to increase the Family Planning programme integration with health and nutrition programmes. With this integration activitity, it is expected that a double result can be derived namely the decrease of infant mortality rate which is to be followed by steady decrease of fertility rate since life expectancy of the babies will be more secured. These efforts have been carried out through varius integrated activities between the Family Planning programme and other programmes. also, by increasing the role of women in the Family Planning programe, it is hoped that womenfolk will take an active part in the development of the province and have a better role in decision making.

The Irian Jaya National Family Planning Coordinating Board has been established as a realization of a Decision by Head of the National Family Planning Coordinating Board No 27/SK-1/1979 dated March 31,1979, on the establishing of 11 (eleven) Representatives of the Family Planning Coordinating Board in the provinces. Based on that decision, the implementation of the Family Planning programme was officially initiated in Irian Jaya in 1979. Before being decided as a programme of the Central Government, the implementation of Familiy Planning programme in Irian Jaya province was carried out by the Indonesian Family Planning Association and the Armed Foreces agencies.

In effort to smoothen the implementation and target achievment of the Family Planning programme, Irian Jaya Governor has issued and instruction letter No 14 of 1980 and a decision letter No 225 of 1980 concerning the establishement and Appointement of a Family Planning and Population Guiding Team both at District and Sub-district levels.

The implementation of the Family Planning and Population programmes in Irian Jaya province was started in 1979 and until the end of Pelita III in 1983 thei showed a good and improving result. This was achieved thank to the support and cooperation rendered by the Government as well as Private implementation units both as manager and motivators of the Family Plann-

Tabel / *Table IV — 17*

JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH DAN SWASTA BESERTA KAPASITAS TEMPAT TIDUR MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985

NUMBER OF GOVERNMENT—RUN AND PRIVATE—RUN GENERAL HOSPITALS AND THEIR BED—CAPACITY BY DISTRICT, 1985

No.	Kabupaten *Districts*	Pemerintah *Government*		Swasta *Private-run*		A B R I *Military*		Jumlah *Total*	
		Rumah Sakit *Hospitals*	Tempat Tidur *Beds*	Rumah Sakit *Hospitals*	Tempat Tidur *Beds*	Rumah Sakit *Hospitals*	Tempat Tidur *Beds*	Rumah Sakit *Hospitals*	Tempat Tidur *Beds*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Merauke	1	108	-	-	1	25	2	133
2.	Jayawijaya	1	26	1	25	-	-	2	51
3.	Jayapura	2	377	-	-	2	139	3	516
4.	Paniai	1	50	1	50	-	-	2	100
5.	Fak-Fak	1	58	1	35	-	-	2	93
6.	Sorong	2	265	1	20	2	25	5	310
7.	Manokwari	1	153	-	-	2	66	3	163
8.	Yapen Waropen	1	48	-	-	-	-	1	48
9.	Biak Numfor	1	102	-	-	2	172	3	274
	Irian Jaya	11	1.142	4	130	9	416	24	1.688
	1984	9	906	5	150	9	416	23	1.472
	1983	9	906	5	150	9	416	23	1.472
	1982	9	906	5	150	9	416	23	1.472
	1981	10	960	5	133	4	315	19	1.427

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985.
Source : Irian Jaya in Figures, 1985.

mengalami peningkatan sedangkan Perawat gigi dan dalam tahun 1981 sebanyak 14 orang dan tahun 1983 meningkat menjadi 25 orang sedangkan tahun 1985 menurut menjadi 13 orang.

Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta beserta kapasitas tempat tidurnya di Propinsi Irian Jaya tahun 1985. Rumah sakit Pemerintah yang berada di 9 Kabupaten sebanyak 11 buah dengan kapasitas tempat tidur 1.142 tempat tidur, Rumah Sakit Swasta sebanyak 4 buah dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 130 tempat tidur, sedangkan Rumah Sakit ABRI sebanyak 9 buah dengan kapasitas 416 tempat tidur.

b. Keluarga Berencana

Kalau permasalahan utama di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana dalam Repelita IV di Propinsi lain di luar Irian Jaya adalah jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat, maka Irian Jaya permasalahannya justru sebaliknya. Yaitu bahwa dengan sedikitnya penduduk dibandingkan dengan luas wilayah telah menimbulkan masalah di bidang penduduk dan Keluarga Berencana. Sedikitnya jumlah penduduk dan sebagian terbesar adalah di daerah pedalaman yang sangat sulit dijangkau melalui transportasi telah menjadi suatu tantangan bagi pembangunan di Irian Jaya.

Akumulasi penduduk Irian Jaya sebagian besar berada di daerah pedalaman tersebut juga disertai dengan tingkat sosial, ekonomi dan budaya yang kurang menguntungkan. Komunikasi dan transportasi cukup sulit dan mahal karena luasnya sehingga sampai sekarang sasaran program di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana ini sukar dijangkau.

Dari berbagai tantangan yang dimiliki Irian Jaya di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana telah ditetapkan suatu kebijaksanaan yang bersifat strategis antara lain peningkatan integrasi program KB dengan kesehatan dan gizi. Dengan kegiatan Integrasi ini diharapkan akan dicapai hasil ganda yaitu menurunnya angka kematian bayi dan anak yang diikuti dengan menurunnya angka kematian bayi dan anak yang diikuti dengan kemantapan turunnya tingkat fertilitas, karena kelangsungan hidup anak yang sudah lahir akan lebih terjamin. Upaya ini dicapai dengan berbagai kegiatan terpadu antara program KB dan program lainnya. Juga melalui peningkatan peranan wanita dalam program KB diharapkan kaum wanita secara aktif ikut dalam pembangunan serta mempunyai peranan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

Terbentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Irian Jaya adalah sebagai realisasi Surat Keputusan Kepala BKKBN No 27/SK-1/Tahun 1979 tanggal 31 Maret 1979, tentang pembentukan 11 (sebelas) Propinsi Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Propinsi. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, maka pada tahun 1979 pelaksanaan program Keluarga Berencana secara resmi dimulai di Propinsi Irian Jaya. Sebelum dijadikan program Pemerintah, pelaksanaan Keluarga Berencana di Propinsi Irian Jaya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Lembaga ABRI.

Tabel / *Table IV — 18*

BANYAKNYA TENAGA DOKTER MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985

NUMBER OF DOCTORS BY DISTRICT IN 1985

No	Kabupaten *Districts*	Dokter / *Medical Doctors*			Jumlah *Total*
		Ahli *Specialist*	Umum *General Practioner*	Gigi *Dentists*	
1	2	3	4	5	6
1.	Merauke	-	11	–	11
2.	Jayawijava	-	8	-	8
3.	Javapura	5	29	5	39
4.	Paniai	-	8	1	9
5.	Fak-Fak	-	8	1	9
6.	Sorong	2	6	2	10
7.	Manokwari	-	13	2	15
8.	Yapen Waropen	-	4	-	4
9.	Biak Numfor	-	10	-	12
	Irian Jaya	7	97	13	117
	1984	7	98	14	119
	1983	6	92	14	112
	1982	6	83	15	104
	1981	5	71	12	88

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985
Source : Irian Jaya in Figures, 1985.

ing Programme. Other thing that helped the programme was the commitment of Government apparatuses in the Regional Administration through integrated programmes, the Armed forces and participation of the public in general. Support and cooperation rendered by various sides have shown a rural result by the increasing number of Family Planning programme participants, who use a variety of contraceptive devices. See Table IV – 20

Table/Tabel IV – 20

The Family planning programme implementation in Irian Jaya province is still in the phase of scope expansion. It is carried out in a persuasive way, by means of communication, information and education system.

Up to the end of Pelita III, there was an increase in the Family Planning Programme participation with 9,626 new participants or an increase by 38.3% if compared to 1980/1981. See Tables IV 1 21 and IV – 22.

The achievment in the total number of active Family Planning parcitipants has been reached through guiding and motivating activities to establish the use of various contraceptives among the participants quantitatively. It is also and effort to ensure the acceptance of the Family Planning ideas by the people in this case through their participation by joining as well as managing

Tabel / *Table IV — 19*

BANYAKNYA TENAGA PERAWAT DAN BIDAN MENURUT KABUPATEN TAHUN 1985
NUMBER OF NURSES AND MIDWIVES BY DISTRICT IN 1985

No	Kabupaten *Districts*	Perawat / *Nurses* Umum *General*	Gigi *Dental care*	Jiwa *Mental disease*	Jumlah *Total*	Bidan *Midwives*
1	2	3	4	5	6	7
1.	Merauke	173	1	-	174	8
2.	Javawijava	118	-	-	118	4
3.	Jayapura	376	3	16	395	73
4.	Paniai	93	2	-	95	4
5.	Fak-Fak	104	1	1	106	12
6.	Sorong	185	4	-	189	12
7.	Manokwari	187r	1r	-	172	13r
8.	Yapen Waropen	82	-	-	82	4
9.	Biak Numfor	138	1	-	139	9
	Irian Jaya	1.456r	13r	17r	1.470	139r
	1984	443	10	3	456	118
	1983	456	25	3	484	109
	1982	418	14	3	435	109
	1981	366	14	1	381	127

Sumber : Irian Jaya Dalam Angka Tahun 1985.
Source : Irian Jaya in Figures, 1985.

r = angka diperbaiki

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian sasaran program KKB, dikeluarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya No : 14 tahun 1980, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya No : 225 tahun 1980, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Team Pembina Keluarga Berencana dan Kependudukan baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kependudukan di Propinsi Irian Jaya yang dimulai sejak tahun 1979 sampai pada akhir Pelita III tahun 1983 ini telah menunjukkan hasil-hasil yang terus menerus meningkat dan cukup baik. Hal ini dapat dicapai berkat dukungan dan kerjasama antara unit-unit pelaksana Pemerintah maupun Swasta baik sebagai pengelola Program KKB maupun sebagai motivator KB, serta keterlibatan aparat-aparat Pemerintah dalam lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, melalui program-program terpadu, ABRI serta dukungan partisipasi masyarakat.

Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak ini telah menunjukkan hasil yang nyata dengan bertambahnya terus jumlah akseptor peserta KB, dengan menggunakan berbagai cara alat-alat kontrasepsi. Lihat Tabel IV-20.

Penggarapan program KB di Propinsi Irian Jaya masih dalam fase perluasan jangkauan. Penggarapan program KB yang bersifat ajakan, melalui sistem komunikasi, informas, edukatif (KIE).

Sampai pada akhir Pelita III ini, pencapaian peserta KB baru telah menunjukkan hasil yang semakin meningkat yaitu : sebesar 9.626 atau 38,3% dibanding dengan tahun 1980/1981 sebesar 3.687. Lihat Tabel IV-21 dan IV-22.

Pencapaian jumlah peserta KB aktif melalui hasil kegiatan pembinaan dan motivasi merupakan usaha untuk kelbih memantapkan pemakaian berbagai cara kontrasepsi di kalangan peserta KB secara kuantitatif, serta usaha untuk lebih memantapkan penerimaan ide Keluarga Berencana baik dalam hal keikutsertaan masyarakat sebagai peserta Keluarga Berencana maupun dalam peran serta turun mengelola program.

Pemantapan pemakaian alat kontrasepsi secara kuantitatif, ditujukan untuk dapat melindungi kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi peserta KB secara obyektif dan mencegah peserta yang berhenti berKB disamping didukung oleh tersedianya alat kontrasepsi secara terus menerus. Secara kuantitatif jumlah peserta KB aktif sampai dengan tahun 1983 di Propinsi Irian Jaya menunjukkan hasil yang semakin meningkat yaitu sebesar 10.125 atau 7,12% jika dibandingkan pada tahun 1981/1982 sebesar 8.000 lebih atau 5,21%.

Jumlah peserta KB Lestari di Propinsi Irian Jaya tercatat sebanyak 597 peserta atau 5,8% dari jumlah peserta KB aktif dicapai. Lihat Tabel IV-23.

Dari perkembangan yang dicapai di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana ini di Irian Jaya pelaksanaannya selalu dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembangunan lainnya dan akan dicapai pula secara bertahap dengan mengikutsertakan masyarakat untuk lebih aktif lagi, para keluarga maupun individu ikut menjadi peserta KB,

Tabel / *Table IV — 20*

JUMLAH KLINIK KB DI PROPINSI IRIAN JAYA TAHUN 1983
TOTAL NUMBER OF FAMILY PLANNING CLINICS IN IRIAN JAYA PROVINCE IN 1983

No.	Kabupaten *Districts*	Klinik KB *Family Planning Clinics* Pemerintah *Government*	Swasta *Private*	Jumlah *Total*
1.	Jayapura	19	2	21
2.	Biak Numfor	11	-	11
3.	Yapen Waropen	3	-	3
4.	Manokwari	12	-	12
5.	Sorong	13	-	13
6.	Fak-Fak	7	1	8
7.	Merauke	8	-	8
8.	Paniai	8	-	8
9.	Jayawijaya	7	2	9
	Jumlah / Total	88	5	93

Sumber data : BKKBN Propinsi Irian Jaya.
Data source : National Family Planning Board, Irian Jaya.

Tabel / *Table IV — 21*

PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA KB BARU PER METODE KONTRASEPSI TAHUN 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 (KEADAAN AKHIR BULAN MARET 1983)
PROGRESS OF TOTAL NEW PLANNING PARTICIPANTS ACCORDING TO CONTRACEPTIVE METHODS IN 1980/1981 - 1981/1982 - 1982/1983 (BY THE END OF MARCH 1983)

No.	Metode Kontrasepsi *Contraceptive Methods*	Jumlah Peserta KB Baru *Total New Family Planning Participants* 1980/1981	1981/1982	1982/1983
1.	Pil/*Pills*	1.247	2.440	3.365
2.	IUD	1.267	2.069	2.852
3.	Kondom/*Condoms*	492	624	915
4.	Suntikan/*Injections*	-	1.014	1.766
5.	Lain-lain/*Others*	-	1.272	728

Sumber data : BKKBN Propinsi Irian Jaya.
Data source : National Family Planning Coordinating Board, Irian Jaya Province.

the family planning programmes. The established habit of using contraceptives quantitatively is aimed at protecting the continuity of contraceptives usage by the participants objectively and to prevent them from quitting the programme. This should be supported by providing sufficient cintraceptives.

Quantitavely, total active Family Planning participants in Irian Jaya province up to 1983 was 10,125 persons which indicated an increase by 7.12% if compared to 1981/1982 period which was only recorded at over 8000 participants or 5.21% increase from the previous year period.

Total active Family Planning participants who continually take part in the Family Planning programme in Irian Jaya provinces has been recorded at 597 persons or 5.8% of the total number of Family Planning participants in the province. See Table IV-23

The progress in the fields of population and family planning in Irian Jaya has been accomplished through the implementation of integrated activities with other kinds of development in phases and by participation of the society who has become more active, of families and individuals who have become Family Planning participants, officiers, pioners and those who are called the integrated Family Planning motivators.

In Irian Jaya at present eventhough the population is still relatively small, Family Planning implementation has been carried out smoothly in the province with much progress made as explained by the National Family Planning Coordinating Board Irian Jaya who mentioned that the development until December 1985 has been recorded at 31,581 participants which represent an increase by 22% of the previous month. Districts which indicated the increase comprise of Yapen Waropen, Sorong, Fak-Fak, Paniai and Jayawijaya districts. New Family Planning participants tend to use pills.

Meanwhile, an increase of 2.1% has also been recorded in the total number of active Family Planning participants compared to the previous month. In December 1985 the total number was only 39,291 participants. The increase has been recorded in Jayawijaya, Sorong, Paniai and Fak-Fak districts.

Tabel / *Table IV — 22*

JUMLAH PESERTA KB AKTIF MENURUT ALAT KONTRASEPSI SETIAP KABUPATEN DI PROPINSI IRIAN JAYA (KEADAAN AKHIR BULAN MARET 1983)
TOTAL NUMBER OF ACTIVE FAMILY PLANNING PARTICIPANTS ACCORDING TO CONTRACEPTIVES IN EVERY DISTRICT OF IRIAN JAYA PROVINCE (BY MARCH 1983)

No.	Kabupaten *District*	P I L *Pill*		I U D *IUD*		Kondom *Condoms*		Suntikan *Injections*		Lain-lain *Others*		Jumlah *Total*	
		Peserta *Participants*	%	Peserta *Participants*	%	Peserta *Participants*	%	Peserta *Participants*	%	Peserta *Participants*	%	Peserta *Participants*	%
1.	Jayapura	380	17,26	766	34,80	253	11,49	626	28,44	176	7,99	2.201	%
2.	Biak Numfor	395	40,80	185	19,11	77	7,95	206	21,28	105	10,84	968	
3.	Yapen Waropen	94	26,18	174	48,46	18	5,01	62	17,27	11	3,06	359	
4.	Manokwari	484	42,01	347	30,12	62	5,38	217	18,83	42	3,64	1.152	
5.	Sorong	1.046	37,27	905	32,25	248	8,83	287	10,22	320	11,40	2.806	
6.	Fak-Fak	96	21,86	88	20,04	16	3,64	231	52,61	8	1,82	439	
7.	Merauke	364	38,83	223	23,79	86	9,17	205	21,87	59	6,29	937	
8.	Paniai	341	43,71	180	23,07	161	20,64	83	10,64	15	1,92	780	
9.	Jayawijaya	332	75,79	60	13,69	28	6,39	60	13,69	3	0,68	438	
	Irian Jaya	3.532	38,88	2.928	28,91	949	9,37	1.977	19,52	739	7,29	10.125	

Sumber data : BKKBN Propinsi Irian Jaya
Data source : BKKBN Irian Jaya Province.

pelaksana, pelopor dan mereka pula menjadi penggerak KB secara terpadu pula.

Di Irian Jaya pada saat ini walaupun penduduknya relatif masih kecil, pelaksanaan KB tetap berjalan lancar dan telah banyak mengalami kemajuan, sebagaimana diperoleh informasi dari BKKBN Propinsi Irian Jaya yaitu perkembangan sampai Desember tahun 1985 peserta kB telah berjumlah 31.581 orang yang berarti mengalami kenaikan sebesar 22% dari bulan sebelumnya. Kabupaten-Kabupaten yang mengalami kenaikan KB baru yaitu : Yapen Waropen, Sorong, Fak-Fak, Paniai dan Jayawijaya. KB baru ini lebih condong mempergunakan Pil.

Sedangkan bagi peserta KB aktif juga mengalami kenaikan 2,1% dari bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Desember 1985 mencapai 39.291 orang. Kenaikan pembinaan peserta KB ini di Kabupaten Jayawijaya, Sorong, Paniai dan Kabupaten Fak-Fak.

Metode kontrasepsi yang dipakai oleh Peserta KB aktif yaitu 55,4% menggunakan Pil, 20,1% menggunakan IUD, 15% mengunakan suntikan, 2,9% menggunakan kondom dan lain-lain 6,3%.

5. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan sektor Kesejahteraan Keluarga adalah merupakan bagian integrasi dari usaha mencapai terwujudnya kesejahteraan lahir bathin masyarakat agar dapat mengupayakan peranannya dalam pembangunan.

Penanganan Kesejahteraan Sosial di Irian Jaya mempunyai satu kekhususan karena prioritas utama yang memperoleh penanganan di sektor Kesejahteraan Sosial ini adalah di daerah pedalaman dan daerah perbatasan dengan Papua New Guinea yang meliputi pengembangan Kesejahteraan Sosial terhadap kelompok masyarakat suku terasing, kelompok masyarakat rawan pangan, kelompok masyarakat korban kekacauan GPK/OPM dan repatrian dari PNG, kelompok anak terlantar, kelompok generasi muda melalui karang taruna, peningkatan peranan wanita di bidang Kesejahteraan Sosial dan pekerja sosial masyarakat.

Dari sekian banyak permasalahan sosial yang terdapat di Irian Jaya dapat dicatat berdasarkan perkembangan Pelita III dan Pelita IV tahun I dan II sebagai berikut : (a) anak terlantar 242.321 anak; (b) Lanjut Usia 45.906 orang; (c) Pembinaan Kepahlawanan 14 Taman Makam Pahlawan; (d) Wanita Rawan Sosial Ekonomis 131.856 orang wanita; (e) Perumahan yang tidak layak 186.187 Kepala Keluarga; (f) Masyarakat terasing 696.761 jiwa; (g) Penyandang cacat 7.479 orang (h) Bekas penyandang penyakit Kronis 7.145 orang; (i) Tuna Susila 724 wanita; (j) Anak Nakal 151 anak; (k) Waria 14 orang; (l) Bekas Narapidana 195 orang; (m) Fakir Miskin 215.452 jiwa; (n) Korban Bencanan Alam 219.1730 jiwa; dan (o) Korban gejolak sosial 162.423 jiwa.

Dari jenis-jenis dan jumlah permasalahan sosial di Irian Jaya maka masyarakat terasing, Korban bencana alam, Korban gejolak sosila, anak terlantar, merupakan permasalahan yang berpengaruh luas baik ekonomi, budaya maupun Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari jumlah masyarakat terasing yang 54% dari jumlah penduduk Irian Jaya, berdasarkan sensus 1980 dikatagorikan dalam masyarakat yang menetap, menetap sementara, maupun tidak menetap (nomaden). Mereka biasanya dalam keadaan :

Tabel / *Table IV — 23*

JUMLAH PESERTA KB LESTARI DI IRIAN JAYA
TOTAL NUMBER OF ACTIVE FAMILY PLANNING PARTICIPANTS IN IRIAN JAYA

No.	Nama Kabupaten *District name*	Peserta KB Lestari *Active Family Planning participants*	
		5 tahun *5 years*	10 tahun *10 years*
1.	Jayapura	157	25
2.	Biak Numfor	94	12
3.	Yapen Waropen	11	-
4.	Manokwari	53	5
5.	Sorong	136	[illegible]
6	Fak-Fak	14	-
7.	Merauke	32	6
8.	Paniai	30	3
9.	Jayawijaya	7	
	Jumlah / Total	534	63

Sumber data : BKKBN Propinsi Irian Jaya
Data source : BKKBN Irian Jaya province.

Contraceptive methode used by the active Family Planning participants were pills (55.4%), IUD (20.1%), injections (15%), condoms (2.9%) and others (6.3%).

5. Social Welfare

Social Welfare sector development is an integrated part of the effort to materialize the people's welfare, physically as well as spiritually, so that they can take part in the national development.

The handling of Social Welfare in Irian Jaya has a special characteristic because the main priority in the social Welfare sector is given to the hinterland area and the border with Papua New Guinea area. It covers development of social welfare for certain society groups such as primordial tribes, famine stricken people, victims of GPK/OPM rebes and those repatriated from PNG, destitute children, young generation through youth centres, enhancement the role of women in the field of social welfare, and society social workers.

Social problems found in Irian Jaya recorded according to progress of Pelita (Five Year Development) III and Pelita IV during the first and second year period area as follows: (a) destitute children: 242,321 children; (b) Senior citizen: 45,906 persons; (c) Promotion of Patriotism: 14 Heros cemeteries; (d) Women who are socially and economically weak : 181,856 persons; (e) Unsuitable housing: 186,187 families; (f) Primordial tribe: 696,761 persons; (g) Handicapped/Disabled people : 7,479 persons; (h) Ex-patients of chronic illness: 7,145 persons; (i) Prostitutes: 724 persons; (j) Juvenile delinquents: 151 youth; (k) Transvestites: 14 persons; (l) Ex-convicts: 195 persons (m) The poor: 215,452 persons; (n) Victims of natural disasters: 219,780 pesons; and (o) Victims of Social unrest: 162,423 persons.

From the types and number of social problems in Irian Jaya, the problems of primordial tribes, victims of natural disasters, victims of social upheavals, and destitute children are those which influence greatly the economy, culture as well as secutiry and order of the society.

- Pakaian yang sangat minim dari bahan yang disediakan oleh alam, bahkan ada yang sama sekali belum berpakaian.
- Rumah tidak sehat, penuh dengan asap api sebagai pemanas ruangan.
- Mata pencaharian yang tradisional; dan
- Sistem budaya yang partenalistis; (Pemimpin adalah kepala adat/perang, hubungan kekeluargaan/warga/klan kuat, dan rasa kegotong-royongan, tanggung jawab sosial tinggi.

Korban bencana alam di daerah Irian Jaya dikenal dua macam, yang **pertama** ialah bencana alam kronis yaitu bencana yang dikarenakan cara mengolah tanah petanian di lereng gunung yang masih secara tradisional sekali, sehingga berakibat sering terjadi tanah longsor dan hilangnya tingkat kesuburan tanah karena erosi hujan. Di musim kemarau tanah tersebut sangat kering dan tandus. Di Irian Jaya hampir setiap tahun terjadi bencana kelaparan, terutama di beberapa lokasi yang justru sulit dijangkau. **Kedua** adalah bencana alam sebagai akibat gempa bumi tektonis yang sering membawa korban manusia (tahun 1976 korban bencana alam akibat gempa bumi di Kecamatan Kurima dan Kecamatan Okbibab dan tahun 1980 di Kecamatan Kurima dan Kabupaten Yapen Waropen.

Korban sebagai akibat gejolak sosial merupakan terjadinya benturan sosial akibat sampingan dari pembangunan. Perubahan-perubahan karena pembangunan berhadapan dengan sistem nilai tradisional.

Penyesuaiannya memerlukan waktu. Dalam proses perubahan tersebut terjadi beberapa kemungkinan yaitu mungkin mereka menarik diri dari luar, kembali kedunia semula, reaksioner, karena tidak mampu mengikuti perkembangan dan destruktif, menantang dan merusak hal-hal yang baru yang telah diupayakan pemerintah. Kemungkinan-kemungkinan seperti ini sering dimanfaatkan anasir-anasir OPM/GKP yang mengakibatkan terjadinya kekacauan dan pengungsian.

Sedangkan anak terlantar di Irian Jaya adalah anak yang karena sesuatu sebab orang itu melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial di Irian Jaya selama Pelita III dan IV tahun I dan II masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti penanganan masalah anak terlantar yang berjumlah 242.321 anak hasil yang dicapai adalah sebanyak 10.070 anak atau 34,53%. Masalah perumahan dan lingkungan tidak banyak 186.187 Kepala Keluarga hasil yang dicapai hanya 2.888 KK atau 1,55%. Masyarakat terasing sebanyak 696.761 jiwa hasil yang dicapai hanya 17.275 jiwa atau 2,47% dan korban bencana alam sebanyak 219.730 jiwa hasil yang tercapai hanya 2.863 jiwa atau 1,30%. Lihat Tabel IV-24

Primordial tribes in Irian Jaya comprising 54% of the whole population in the province. Based on the 1980 census, the primordiat tribes can be categorized into those who have resettled, temporatily resettled, and nomadic people. They are usually in the following conditions:

- *Wearing minimal clothes, usually made of stuff provided by the nature, or even wearing no clothes at all.*
- *Their houses are unhealthy, full of smoke caused by fire for heating the rooms.*
- *With traditional source of income; and*
- *Paternalistic cultural system; (A leader is the traditional chief who has the authority on customs, tradition and also war, family/tribal/clan relations are very tight wit strong mutual cooperation, and social responsibility).*

There are two kinds of natural disasters' victims in Irian Jaya. The first are those who suffer from chronic disasters caused by traditional agriculture carried out at mountain slopes, resulting land slides and lost of top soil due to rain erosion. In the dry season the land becomes very dry and barren. In Irian Jaya famine happens almost every year, particularly in remote areas.

Secondly, are natural disasters caused by tectonic earthquake which often brings many casualties and lives (in 1976 there was an earthquake in Kurima sub-district and Ojbibah sub-district and in 1980 Kurima and Yapen Waropen districts were hit by another earthquake, all caused many victims).

Victims of social upheavlas is the result of social changes comprising the ide effect of development. Development has brough some changes which often have to face the old traditional values. It takes time to adjust the people. In the process of changing there are many possible reactions; the people migh withdraw themselves, return to their old lives, or become reactionary, unable to follow the development and instead become destructive, challenge and destroy new ways introduced by the Government. These possibilities often used by OPM/GKP elements to cause unrest and evacuation.

While destitute children in Irian Jaya area those for one or other resons have been abandoned or neglected by their parents so the children's need can not be fully met.

The Government's efforts to overcome social problems in Irian Jaya during Pelita III and IV, in the first and second year were still not as expected by the people. Like for instance the problems of destitute children numbering 242,321. Only 10,070 children have been taken care of or 34.53 %. While for the problem or unsuitable housing and environment of 186,1987 families only 2,888 families or 1.55 % have been taken care of. Out of 696,761 people of primordial tribes only 17,275 persons of 2.47 % have been taken care of. There were 219,730 victims of natural disasters but only 2,863 persons of 1.30 % have been taken care of. *See Table IV – 24*

Tabel / *Table IV — 24*

DATA PENYANDANG MASALAH DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI SELAMA PELITA III DAN PELITA IV TAHUN I DAN II
DATA OF PEOPLE WITH SOCIAL PROBLEMS AND THE TARGET ACHIEVED DURING PELITA III AND PELITA IV IN THE FIRST AND SECOND YEAR PERIOD

No	Penyandang Masalah *) *People with Social problem*	Jumlah *Total*	Hasil yang telah dicapai **) *Target achieved*		Sisa *Remainder*
			Jumlah *Total*	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Anak Terlantar/*Destitute children*	242.321 anak	10.970	4,53	231.351
2.	Lanjut usia/Jompo/*Senior citizen/aged*	45.906 orang	6.880	14,98	39.026
3.	Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan *Promotion of Patriotism and Freedom Pioneers*	14 TMP	6	42,86	8
4.	Wanita rawan sosial ekonomis/ *Socialy and economically weak women*	131.856 orang	1.830	1,39	130.026
5.	Masalah perumahan dan lingkungan tidak layak/ *The problem of unsuitable housing and environment*	186.187 KK	2.888	1,55	183.299
6.	Masyarakat terasing/*Primordial tribe*	696.761 jiwa	17.275	2,47	693.306
7.	Penyandang cacat/*Handicapped people/Disabled*	7.479 orang	1.893	25,31	5.586
8.	Bekas penyandang penyakit kronis/ *Ex-patient of chronic illness*	7.145 orang	125	1,75	7.020
9.	Tuna Susila/*Prostitute*	724 orang	245	33,84	479
10.	Anak nakal/*Juvenile delinquent*	151 anak	-	-	151
11.	Waria/*Transvestite*	14 waria	-	-	14
12.	Bekas Narapidana/*Ex-convict*	395 orang	-	-	395
13.	Fakir Miskin/*Poor people*	215.452 jiwa	-	-	215.452
14.	Korban Bencana Alam/*Victims of Natural disaster*	219.730 jiwa	2.863	1,30	216.367

Sumber / ***Source:***

*) *Buku Data Penyandang Masalah Kesehatan Sosial Propinsi Irian Jaya, 1985.*
Book on Data of People with Social Health Problem, Irian Jaya province, 1985.

**) *Buku Program Pembangunan Bld. Kesjh. Sosial Pelita III dan Pelita IV Th. I dan II, Agustus 1985*
Book on Development Programme in the Social Welfare field, Pelita III and Pelita IV, First and Second Year, August, 1985.

6. Perumahan Rakyat dan Pemukiman

Keadaan perumahan dan pemukiman terutama selama Pelita III dan Pelita IV di Irian Jaya menunjukkan banyak perkembangan melalui kegiatan perbaikan dibanding dengan kurun waktu sebelumnya. Namun demikian masih terdapat keadaan yang memerlukan perhatian segera.

Kegiatan pembangunan perumahan di kalangan masyarakat terutama di Ibukota Kabupaten menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pembangunan PERUMNAS baru akhir Pelita III dimulai di kota Jayapura yang jumlahnya sebanyak 685 unit.

Sedangkan perbaikan perumahan yang termasuk dalam kategori kumuh baru dilaksanakan di beberapa kota antara lain di Jayapura, Biak, Manokwari, dan Merauke. Di lain pihak pertumbuhan kota yang pesat memerlukan perencanaan kota yang baik karena ada kecenderungan yang kuat akan tumbuhnya pemukiman liar dan pengrusakan lingkungan.

Air bersih untuk daerah perkotaan selama Pelita III tersedia kapasitas rata-rata 20/Liter/detik dengan peningkatan/perluasan pelayanan. penyediaan air bersih di perkotaan masih mempunyai masalah yang perlu dihadapi terutama di kota Jayapura dan Merauke. Seperti bagi kota Jayapura berhubung pertumbuhan yang relatif bertambah, dikaitkan dengan sumber air yang sangat terbatas.

Sedangkan di Merauke sangat berhubungan erat dengan pengaruh iklim yang setiap tahun mengalami musim kering selama 8 (delapan) bulan.

Tentang prasarana kota yang diperuntukkan bagi pemeliharaan kesehatan lingkungan telah dilaksanakan baik berupa pembangunan drainase, assienering maupun pembuatan saluran pembuangan kotoran. Namun nampaknya masih memerlukan kegiatan yang berlanjut. Khusus di kota Merauke selain mengalami banjir dalam musim penghujan. Banjir di daerah ini sudah dialami secara periodik karena memang Merauke relatif rendah dan tanahnya datar dan hanya rata-rata 3 meter di atas permukaan laut. Banjir ini pula adalah disebabkan keadaan amplitudo pasang surut lautnya cukup tinggi.

a. Pemukiman di Perkotaan

Pada umumnya peranan kota sebagia pusat pelayanan bagi wilayah bawahannya belum diimbangi oleh wilayah bawahannya dengan fungsi pendukung bagi penyediaan barang dan jasa bagi kota. Hal ini menyebabkan kota-kota di Irian Jaya masih sangat tergantung pada kota-kota di luar Irian Jaya.

Keadaan memang agak berbeda bagi kota yang mempunyai hinterland daerah transmigrasi. Keadaan ketergantungan ini sedikit demi sedikit semakin berkurang sejalan dengan perkembangan lokasi transmigrasi tersebut. Kota di Irian Jaya ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi (rata-rata 4%) sethun. Pertumbuhan ini pada umumnya disebabkan oleh terjadinya urbanisasi dan imigrasi penduduk dari Propinsi lain.

Terjadinya urbanisasi dan imigrasi ini adalah karena masyarakat tertarik kepada pertumbuhan kegiatan dibidang pelayanan pemerintah maupun pertumbuhan kegiatan perekonomian, dan pembangunan. Hal ini ternyata berpengaruh pula terhadap kebutuhan perumahan yang menyebabkan timbulnya perumahan-perumahan liar di daerah aliran sungai, pembangunan rumah di daerah milik jalan, pembangunan rumah berhempit-hempit di daerah yang sempit menimbulkan daerah-daerah slum. Kurangnya penyediaan air bersih yang menyebabkan sulitnya mendapat air bersih atau terjadi perusakan pipa oleh masyarakat untuk mendapatkan air. Tidak tersedia fasilitas pembuangan sampah dan air kotor dan lain-lain.

Selama 3 periode Pelita, sudah banyak usaha dilakukkan untuk menanggulangi permasalahan pemukiman perkotaan di Irian Jaya. Sebagai hasilnya tahun demi tahun keadaan pemukiman perkotaan semakin baik. Beberapa usaha yang dilakukan selama Pelita-Pelita yang lalu adalah : a. Perbaikan pemukiman dan perumahan selama Pelita III telah dilaksanakan perbaikan perumahan dan lingkungan di Jayapura, Biak, Manokwari dan Merauke. Dalam program ini dilakukan perbaikan daerah-daerah slum dengan memperbaiki jalan lingkungan fasilitas kebersihan serta perbaikan rumah. Disamping itu, di semua kota sudah mulai ditertibkan pembangunan rumah-rumah baru dengan proses peresmian yang lebih teliti.

Penambahan perumahan di kota juga ditempuh dengan pembangunan perumahan oleh Perumnas yaitu pada Pelita III dibangun 685 unit rumah di Wamena Jayapura. Pembangunan Perumnas di kota lain seperti Sorong dan Merauke masih dalam tahap persiapan. b) Perbaikan drainage dan assaenering yaitu untuk melancarkan pembuangan air limbah kota serta air hujan di kota Jayapura, Sorong, Wamena, Biak. Sedang di Merauke perbaikan drainage ini dimaksud untuk pencegahan banjir, yang akan terjadi rutin setiap musim apabila tidak ada

6. People's Housing and Settlement

Housing and Settlement situation in Irian Jaya particularly during Pelita III and Pelita IV period has indicated a lot of progress through reparation efforts compared to the past period. However, there are still some problems that need to be given attention soon.

Housing development effort among the society especially indistrict capitals has shown much progress. New PERUMNAS (People's housing) houses have begun to be built by the end of Pelita III in Jayapura city comprising 685 units.

While housing reparation for those considered as in bad condition has been carried out in several cities amoung others in Jayapura, Biak, Manokwari and Merauke. On the other hand the fast growth of the cities needs good city planning because there is a strong indication of illegal settlement and enviriomental destruction growing.

Clean water for urban area during Pelita III has been provided with a capacity of 20 liters/second and with an increase/expansion of services. There are some problems in clean water supply for urban areas that have to be faced, especially in Jayapura and Merauke. In Jayapura for instance, the problem is the relatively fast growth but with only limited clean water sources.

While in Merauke the problem is closely related to the climate, for the area every year has to face an 8 (eight) mounth dry season.

Concerning the city infrastructure for environmental health, there have been build some drainage, assienering as well as sewerage. However, more efforts should be done in this matter. Particularly in Merauke which still has to face flood in the rainy season. The flood in this area comes periodically because Merauke is situated in low area, the land is flat and only averagely three metres above sea-level. The flood is also caused by high amplitude of sea tide.

a. Settlement in Urban Area

In general, the role of city as the centre of services for lesser regions has not been supported by enough supply of goods and services for the city. As a result, cities in Irian Jaya depend very much on other cities outside Irian Jaya.

The situation, however, is slightly different in the hiterland area with transmigration resettlement. The dependence has gradually been reduced in line with the development of the transmigration resettlement. Cities in Irian Jaya are marked with high population growth (averagely 4%) a year. This figure is caused by, mostly. urbanisation and migration of people from other provinces. The urbanisation and migration happen since people are attracted by the growth of activities in the field of government services as well as in economy and development. This, in fact, has also influenced the housing need which in turn has resulted in the growing of illegal housing along te rivers, on land alocated for the streets, and many houses have been built so closely to each other in a small area, creating slumps.

Unsufficient clean water supply makes it difficult to get clean water or people would damage the water pipe to get clean water. There is no facility for garbage dumping and sewerage and so on.

During threre Pelita period, a lot of efforts have been done to overcome the problem of urban settlement in Irian Jaya. As a result, the situation has indicated some improvement each year. Some of the efforts carried out in the past Pelitas are: a) Improvement of housing and settlement during Pelita III has conducted by improving housing and environmental condition in Jayapura, Biak, Manokwari and merauke. The programme included slump areas improvement by rehabilitating local streets, sanitation facility and repairing the houses. Aside from that, and effort has also been made to put an order to new housing in all cities with more careful procedure.

To increase the number of houses in the city, new houses were built by Perumnas during Pelita III comprising 685 units in Waena Jayapura. Other perumnas housing projects are still under preparation such as in Sorong and Merauke. b) Drainage and assaenering reparis were carried out to smoothen the flow of city waste and rain water in Jayapura, Sorong, Wamena and Biak. While in Merauke the drainage was repaired to prevent floods which would happen every rainy season if there is no sufficient drainage system.
c) Road and briges inthe city have been continuously built in the Province's capital and all districts capitals. The building of new roads is meant to expand the settlement ara by. opening new area.
d) Clean water supply improvement. Efforts to rehabilitate and increase the infrasutructures and facilities for clean water supply have been done to meet the need of all districts capitals. In efforts to improve clean water supply a survey has been conducted in 10 cities in Irian Jaya by an Australian consultant. The result of the survey is expected to help clean water planning in Irian Jaya.
e) For city planning or arrangement another survey has also been conduted in 9 districts capitals in an effort to make a City master Plan up to the year 2000.

b. Settlement in Rural Area

Rural settlement in Irian Jaya is always grouped into three patterns namely, traditional patters, resettlement pattern and transmigration pattern.

sistim drainage yang memadai. c) Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kota dilakukan terus menerus setiap tahun di semua ibukota Propinsi dan Kabupaten. Pembangunan jalan baru dimaksud untuk memperluas areal pemukiman dengan membuka daerah baru. d) Meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih. Usaha rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana air bersih sudah banyak dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhan air bersih di semua kota Kabupaten. Dalam usaha peningkatan air bersih untuk jangka panjang telah dilakukan survey oleh konsultan dari Australia di 10 kota di Irian Jaya. Hasil survey ini diharapkan dapat membantu dalam perencanaan ari bersih di Irian Jaya. e) Penataan kota telah dilakukan penelitian di 9 Ibukota Kabupaten dalam usaha menyusun Rencana Induk Kota sampai tahun 2000.

b. Pemukiman di Pedesaan

Di Irian Jaya pemukiman di daerah pedesaan selalu dikelompokkan dalam 3 pola yaitu pemukiman pola tradisional, pola pemukiman kembali dan pola pemukiman transmigrasi.

Pemukiman Pedesaan dengan pola tradisional umumnya merupakan pemukiman satu klan yang menetap atau yang berpindah-pindah mengikuti pembukaan lahan yang dimiliki klan tersebut. Areal lahan yang dimiliki tergantung kepada kekuatan klan dan sekutu-kutunya dalam mempertahankan serangan klan lain ataupun kekuatannya untuk merampas lahan milik klan lain. Sebagai akibat dari keadaan ini ada klan yang terdesak dan hanya memiliki lahan dengan areal yang relatif sempit. Sering terjadi areal lahan ini terletak pada lokasi yang topografinya curam sehingga tidak cocok untuk pertanian. Pola ini dicirikan oleh pemukiman klan-klan dengan jumlah keluarga yang kecil yang umumnya terpencil dan sukar dihubungi. Pola seperti ini ditemukan di daeah-daerah pedalaman di pegunungan Jayawijaya, kepala Burung, Yapen Waropen dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas pemukiman seperti air minum, kesehatan lingkungan lainnya belum dikenal dalam pola pemukiman ini.

Sedangkan pola pemukiman kembali (Resettlement) merupakan pola pemukiman yang sudah sejak dimulai sejalan dengan berkembangnya agama, datangnya penjajah serta sejak didatangkan guru-guru di daerah pedalaman. Di daerah yang didatangi klan-klan yang seketurunan dikumpulkan pada lokasi tertentu agar tenaga guru, rumah ibadah dan pelayanan lainnya dapat dimanfaatkan secara efisien. Kebanyakan kampung di Irian Jaya terutama dimana pengaruh agama Kristen Protestan dan Katholik sangat kuat terbentuk pada phase ini. Tipe kampung yang demikian dapat digambarkan sebagai : Ada jalan utama ditengah, ditengah kampung ada rumah guru, rumah sekolah dan gereja. Gereja sering juga digunakan sebagai rumah sekolah. Ladang-ladang penduduk umumnya terdapat pada lahan yang secara tradisional merupakan milik klan yang bersangkutan. Selain itu pula lokasi pemukiman umumnya dekat dengan sumber ari untuk keperluan rumah tangga. Pola pemukiman kembali yang dilaksanakan sesudah Irian kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi adalah proyek Kampung Gaya Baru dan pemukiman kembali suku-suku terasing. Dilaksanakannya pemukiman kembali bagi sebagian masyarakat Irian Jaya adalah untuk mendekatkan rakyat di kampung-kampung terpencil kepada fasilitas-fasilitas pelayanan dan supaya dekat terhadap pengawasan dari Pemerintah. Juga untuk menemukan jumlah penduduk minimal pembentukan desa administratif, yakni sebanyak 500 Kepala Keluarga serta untuk lebih mudahnya diadakan pembinaan penduduk yang berpola budaya masih statis tradisional menjadi masyarakat yang dinamis rasional. Lihat Tabel IV-25.

Mengenai pemukiman dengan pola transmigrasi di Irian Jaya sudah dimulai sejak dilaksanakan pemasukan transmigran di Daerah Irian Jaya pada tahun 1964. Desa-desa yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk suatu pemukiman dihuni sebagian besar transmigran yang berasal dari Pulau Jawa, Bali dan sebagian penduduk setempat juga dimukimkan di lokasi tersebut sebagai transmigran lokal. Alokasi untuk penduduk setempat adalah 10% - 25% dari seluruh pemukiman transmigrasi.

c. Air Bersih

Di Irian Jaya khususnya di kota-kota Kabupaten penyediaan air bersih untuk keperluan masyarakat di perkotaan sudah ada sejak masa pemerintahan Belanda. Di setiap kota yang sekarang menjadi kota Kabupaten dan beberapa kota Kecamatan instalasi air minum di kota yang berdekatan dengan pantai, disamping untuk keperluan penduduk juga digunakan untuk mensuplay kapal-kapal. sedangkan di kota Kecamatan dan di pedesaan umumnya belum ada instalasi air minum. Untuk memenuhi kebutuhan, air bersih didapatkan dari sungai, sumur dangkal, sumur pompa ataupun air hujan.

Sejak tahun 1963 terlebih-lebih sejak Pelita dilaksanakan telah banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatan penyediaan air bersih bagi masyarakat di kota-kota maupun di desa. Usaha yang dilakukan

Rural settlement with traditional pattern consists of one clan or tribe which settles permanently or nomadic from one place to another following the opening of new agricultural fields which belong to the clan. The land area owned by the clan depends on its strength and also of its allies in defending itself from the attack from others which try to snatch the land from it. This situation has caused some clans to be in pecession of very small area of landfield. It often happens that the field is located in an area which is so steep topographically and unsuitable for agriculture. This pattern is characterized by settlemens for the clans with small family number mostly in remote areas and difficult to reach. This kind of pattern can be found in hinterland such as in Jayawijaya mountains, Kapala Burung, Yapen Waropen and others. Settlement facilities such as clean water, healthy environment etc. have yet to be introduced in the settlement pattern.

While resettlement pattern has long been introduced in line with the spreading of religions, colonialism and since the sending of teachers to hinterland. They came to a certain area, then several clans of the same origin are gathered there so the teachers, religious houses and other services can be used as efficiently as possible. Most villages in Irian Jaya, particularly in the area where there is a strong influence of Protestanism and Catholicism, were built during this phase. The picture of this type of village can be described as follows: There is a main street, righ in the centre of the village there are a teacher's house, school and church. Church sometimes is also used as the school building. Meanwhile, the land that owned by the people is actually located in an area which, traditionally, belongs to the clan. Apart from that, the settlement is usually located near water source so it will be quite convenient for every house or family. Resettlement pattern has been carred out in Irian Jaya since the province was returned to Indonesia. It is called the New Style Village Project and Resettlement of Primordial Tribes. The resettlement programme is meant to attract part of Irian Jaya people who still live in remote areas so that they can move to places which are near to servicing facilities, close to the government supervision. On the other hand, it is also to meet the minimal number of people for setting up and administrative village, namely 500 families. Other aim is to promote people with static-traditional pattern to become dynamic-rational one.

The settlement programme with transmigration pattern has been carried out in Irian jaya since 1964 when the first group of trasgmigrants arrived in the province. Villages were prepared to become new resettlement area and now are mostly occupied by transmigrants from Java and Bali islands and also by local people who have resettled in that area. Allocation for local people is between 10% to 25% of the whole transmigration resettlement area. See Table IV – 25

C. Clean Water

In Irian Jaya, particularly in district cities, clean water supply for urban people has been provided since the Dutch Colonial time. Every city which is now has become a District city and some sub-district cities have been provided with clean water supply. In coastal area, the clean water supply instalation also provides water for ships. But in some sub-district cities and villages there are no drinking water instalation yet. Clean water is obtained from rivers, shallow wells, water pump or rain water.

Since 1963, especially since the launching of Pelita, a lot of efforts have been carried out to increase clean water supplies for urban people as well for rural people. One of the efforts is rehabilitation of the existing facilities. While in sub-districts and village it is being carried out by increasing drinking water supply through new water pump or wells and water receptacle.

The efforts to supply clean water for the people have been continuously carried out during Pelita I, II and III and Pelita IV period through APBN fund which is managed by the Ministry of Health and the Central Government. See Table IV – 26

Clean water in Irian Jaya has its source in rivers, springs, well, morass and rain water. In Jayapura water comes from five small rivers (Anafre, Klofkamp, APO and Kamp Wolker) which are located in the hills around Jayapura. The water flow from the rivers is much influenced by the seasons because of the mostly small catchment areas In long term these water sources will not be able to meet the need for clean water in Jayapura (which is estimated at 305 litre/second in 2005).
A water soirce that can be utilized to meet this demand is Sentani lake which has the capacity of 20,000 litre/second. Water quality of Sentani lake is suitable for drinking water. While clean water sources in Manokwari. Wamena and Sorong also come from the rivers which are quite potential to be further developed tomeet the demand.

In Biak, the water comes from Suerbo river which is not sufficient anymore. New water sources are wells with better water quality.

Fak-Fak has its water source in the spring while Merauke obetins its water from Blue morrass and wells in Wasor and other wells in the city. But the

Tabel / *Table IV — 25*

PENEMPATAN RESETTLEMENT DESA DI IRIAN JAYA S/D 1983
VILLAGE RESETTLEMENT PLACEMENT IN IRIAN JAYA UP TO 1985

No.	Kabupaten *District*	Jml Lokasi *Total Location*	Jumlah Penempatan *Total Placement*					
			Pelita II		Pelita III		Jumlah / *Total*	
			KK *Families*	Jiwa *Persons*	KK *Families*	Jiwa *Persons*	KK *Families*	Jiwa *Persons*
1.	Jayapura	14	223	1013	689	1163	912	2176
2.	Biak Numfor	5	50	255	225	816	305	1071
3.	Paniai	3	-	-	200	613	200	613
4.	Yapen Waropen	1	-	-	60	234	60	234
5.	Manokwari	1	-	-	50	205	50	205
6.	Jayawijaya	12	-	-	382	1259	382	1259
7.	Fak-Fak	5	-	-	557	2205	557	2205
8.	Merauke	4	-	-	250	769	250	769
9.	Sorong	5	80	341	125	494	125	494
	Jumlah / *Total*	50	353	1609	2538	8331	2891	9940

Sumber : Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Irian Jaya.
Source : Directorate for Village Development of Irian Jaya province.

di kota-kota dan pedesaan adalah dengan merehabilitasi. Sedangkan di kota Kecamatan, dan desa dilakukan peningkatan penyediaan air minum dengan pembuatan sumur pompa tangan dan sumur gali serta pembuatan penampungan air hujan.

Usaha peningkatan penyediaan air bersih ini secara terus menerus dilaksanakan secara periode Pelita I, II dan III dan Pelita IV melalui APBN yang dikelola Departemen Kesehatan maupun Pemerintah Daerah. Lihat Tabel IV-26.

Air bersih di Irian Jaya bersumber dari sungai, mata air, sumur, rawa dan air hujan.

Di Jayapura air bersumber dari 5 sungai kecil (Anafre, Klofkamp, APO dan Kamp. Wolker) yang berada di daerah perbukitan di sekitar kota Jayapura. Debit air sungai-sungai ini sangat dipengaruhi musim karena daerah penangkapnnya rata-rata sempit. Dalam jangka panjang sumber-sumber ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan air bersih Jayapura, (vang diperkirakan sebesar 305 liter/detik pada tahun 2005). Untuk itu sumber yang dapat dimanfaatkan adalah danau Sentani yang mempunyai pengisian 20.000 liter/detik.

Kualitas air danau Sentani memenuhi syarat untuk dipakai sebagai air minum. Sumber air bersih di Manokwari, Wamena, Sorong juga berasal dari Sungai yang potensinya masih dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan. Di Biak sumber air semua adalah dari Sungai Suerbo yang sudah tidak mencukupi lagi, penambahan sumber baru adalah sumur dengan kwalitas air yang lebih baik.

Fak-Fak mempunyai sumber air bersih dari mata air sedangkan Merauke mempunyai sumber air bersih rawa Biru dan sumur di Wasor dan sumur di kota, sumur di kota kering pada musim kemarau. Sumur di Wasor debitnya cukup besar 20 liter/detik tetapi debitnya kecil, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air di Merauke, terutama pada musim kemarau. Air hujan digunakan sebagai sumber air bersih ditempat-tempat yang tidak mempunyai sumber air lain atau sumber tersebut kurang mencukupi.

Pada umumnya air yang didistribusikan ke masyarakat langsung dari sumber tanpa lebih dulu diolah. Kalaupun ada pengolahan baru berupa penyaringan dan pengendapan seperti di Fak-Fak dan Sorong yang belum bekerja sempurna. Jadi kualitas air yang diterima konsumen tergantung pada kualitas air baku dari sumber. Dari pemeriksaan laboratorium oleh team Laboratorium Dit Penyehatan terhadap air dari 5 tanki penampungan di Jayapura (Klofkamp, Polimak, Angkatan Laut dan Kamp Wolker), dapat disimpulkan bahwa secara kimia/fisika dan bakterilogis air tersebut memenuhi standar air minum.

Pengelolaan air bersih di 3 kota yaitu Jayapura, Fak-Fak, Sorong sudah dilaksanakan oleh BPAM (Badan Pengelola Air Minum). Sedang di kota-kota lainnya dikelola oleh DPU Daerah.

7. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara tertib, maksimal dan lestari tetap dituntut adanya pola pengalokasian sumber daya alam dengan asas keterpaduan dan keserasian yang ditunjang oleh kemampuan dan penggunaan Faktor-faktor produksi berupa modal, tenaga, sarana dan prasarana, adanya keserasian institusi dengan selalu

Tabel / *Table IV — 26*

PENYEDIAAN AIR BERSIH DI 9 KOTA KABUPATEN DI IRIAN JAYA S/D TAHUN 1983
CLEAN WATER SUPPLY IN 9 DISTRICT CITIES IN IRIAN JAYA UP TO 1983

No.	Kota *City*	Sumber *Source*	Kapasitas Sumber Liter /detik *Source Capacity Litre/second*	Distribusi *Distribution*	Jumlah KK yang menggunakan *Total families utilizing*
1	2	3	4	5	6
1.	Manokwari	Sungai/*River*	49	pipa/*pipe*	1.000
2.	Fak-Fak	Mata Air/*Spring*	200	pipa/*pipe*	663
3.	Merauke	Sumur/*Well*	2	pipa/*pipe*	480
		Rawa Biru/*Blue Morass*	4		
4.	Serui	Mata Air/*Spring*	25	pipa/*pipe*	300
5.	Nabire	Sumur/*Well*	-	-	480
6.	Wamena	Sumur/*Well*	0,5	-	45
		Sungai/*River*	10	pipa/*pipe*	382
7.	Biak	Sumur/*Well*	21	pipa/*pipe*	1.600
		Sungai/*River*	2	Mobil Tangki *Tanker van*	
8.	Sorong	Sungai/*River*	40	pipa/*pipe*	1.800
9.	Jayapura	S. Anafre/ *Anafre river*	15	pipa/ *pipe*	
		S. Klofkam	20	pipa/*pipe*	3.286
		S. Entrop	25	pipa/*pipe*	
		S. APO	2	pipa/*pipe*	
		S. Wolk		pipa/*pipe*	

Sumber : DPU Tingkat I Irian Jaya.
Source : Public Works Provincial Office Irian Jaya.

latter often get dry in the dryn season. The well in Wasor has the capacity of 20 litre/second but the flow is so small that it can not meet the demand fot clean water in Merauke, particularly during the dry season. Rain water is also used as clean water source can be found or the source is not enough.

In general, clean water is disyributed to the society righ from the source without being processed firts. The processing units in Fak-Fak and Sorong only consist of a filtering and condensation units which have not even work properly yet.

So the quality of water received by the consumer depends on the quality of original water at the source. From the analysis carried out by Laboratory Team of the Directorate of Hygene on the five water reservoirs in Jayapura (Klofkamp, Polimak, Angkatan Laut (Navy) and Kamp Wolker) it can be concluded that based on chemical/physical and bacterilogic points of view, the water has meet the standard as drinking water.

Management of clean water inthree cities in Irian Jaya namely, Jayapura, Fak-Fak and Sorong in carried out by BPAM (Clean Water Management Board). While in other cities it is managed by the regional Public Works offices.

mengingat kelestarian dan keseimbangan ekosistemnya. Lihat Tabel IV-27.

Tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman, dinilai dari tingkat kesuburannya. Secara alami tanah terbentuk dari berbagai jenis batuan yang kandungan mineralnya beraneka, sehingga kesuburan tanahpun berbeda-beda. Kesuburan tanah itupun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti iklim, topografi dan proses pembentukannya. Atas dasar faktor-faktor tersebut, dibuatlah klasifikasi tanah dengan hasil berbagai jenis tanah yang sifat-sifat fisik, kimia dan biologisnya berbeda-beda.

Permasalahan yang dihadapi dalam menjaga kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup meskipun belum separoh daerah-daerah di luar Irian Jaya tetapi perlu juga dipikirkan sendiri kemungkinan bagaimana penanganan masalah-masalah yang timbul yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Irian Jaya mempunyai daya dukung lahan yang relatif kurus ditambah dengan pola bercocok tanam yang masih sangat sederhana/tradisional dan berpindah-pindah, akan merupakan ancaman yang cukup

7. Natural Resources and Environment

To exploit natural resources in order, maximally and and with regard to preservation there should be a natural resources locating pattern based on integrated and harmonious system, supported by skills and the utilization of production factors namely capital, manpower, facilities and infrastructure, with institutional coordination, bearing in mind the preservation and balance of the ecosystem.

Land as a medium for growing plants, is valued by its fertility. In nature, land or soil, is made of various kinds of stones with different mineral contents. Thus, the degree of fertility is also varied. Land fertility depends also on several factors such as climate, topography, and formation process. Based on these factors, a land classification has been made resulting in various, different physical, chemical and biological characteristics.

The problem in preserving natural resources and environment, eventhough concerning only part of Irian Jaya, has to be considered with a view to overcoming the problem which can harm the preservation of natural resources and environment. See Table IV – 27.

Tabel / *IV — 27*

LUAS PERSEDIAAN TANAH PROPINSI DATI I IRIAN JAYA ATAS DASAR PENGGOLONGAN USAHA (DALAM Km2)
EXTENT OF LAND PRESERVED BY CATEGORY IN IRIAN JAYA PROVINCE (IN SQUARE KILOMETRES)

No	Tanah Usaha Kabupaten *District*	Khusus I *Special*	Utama 1 A + 1 B *Prime 1A/B*	Utama 1 C *Prime 1C*	Utama 1 D *Prime 1D*	Utama 2 *Prime 2*	Khusus II *Special II*	Jumlah *Total*
1.	Fak-Fak	6.271	11.715	7.096	5.736	7.402	5.578	43.798
2.	Jayapura	1.748	2.920	13.032	8.949	18.733	4.657	50.039
3.	Jayawijaya	-	-	804	2.830	5.204	34.970	43.808
4.	Manokwari	4.918	4.387	3.636	8.523	7.821	8.274	37.559
5.	Merauke	61.682	30.392	27.437	5.755	2.970	1.744	129.980
6.	Paniai	390	1.993	2.621	2.757	9.008	34.257	50.936
7.	Sorong	4.840	2.694	9.361	8.584	5.343	4.087	34.909
8.	Biak Numfor	-	45	941	1.186	840	-	3.012
9.	Yapen Waropen	1.997	2.419	2.109	3.628	6.413	2.728	19.294
	Jumlah/*Total*	81.756	56.565	67.037	47.948	63.734	96.295	413.355

Sumber : Buku Monografi Irian Jaya Tahun 1984
Source : Book of Irian Jaya in Monograph 1984.

serius bagi kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup. Disamping itu yang tidak boleh diabaikan adalah penebangan pohon-pohon di daerah dingin yang tidak hanya sekedar sebagai bahan bakar untuk memasak, tetapi lebih dari itu sebagai bahan bakar untuk melawan hawa dingin yang dapat lebih dari 12 jam pemakaian dalam seharinya. Lahan pertanian tradisional terutama lahan pertanian kering masih tetap rawan terhadap bahaya kemerosotan kesuburan tanah karena erosi dan pencucian hara oleh hujan.

Pola pengawetan lahan belum banyak diketahui oleh masyarakat Irian Jaya terutama masyarakat pedalaman. Pola pengalokasian sumber daya alam hutan melalui suatu tata guna hutan belum dapat berjalan dengan baik, sehingga masih sering terjadi tumpang tindihnya alokasi areal untuk kepentingan sektor lain. Selain itu juga kurangnya tenaga-tenaga penyuluh baik tenaga penyuluh pertanian maupun kesehatan. Penelitian jenis-jenis pohon di Irian Jaya baru 43 jenis dari sejumlah ± 600 jenis pohon yang ada di Irian Jaya.

Irian Jaya yang boleh dikatakan murni dari gangguan/pencemaran lingkungan oleh limbah dengan potensi pengembangan yang sangat besar, perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang mendasar sehingga setiap gerak dan kegiatan pembangunan mengikuti pedoman yang digariskan untuk dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistemnya.

Dengan demikian pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat secara maksimal dan lestari untuk kesejahteraan rakyat. Untuk jenis kekayaan alam yang tidak diperbaharui pemanfaatannya harus benar-benar secara optimal dan menurut prioritas yang sudah dipertimbangkan secara mendalam. Pada lahan-lahan kritis dan padat penduduk usaha reboisasi dan penghijauan perlu lebih digalakkan dengan penanaman jenis-jenis pohon yang cepat tumbuh dan bernilai ganda yaitu dapat berfungsi untuk perlindungan tanah dan air juga bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan penduduk akan hasil hutan. Yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kaitan dengan penghijauan ini adalah kemungkinan kayu bakar dari hasil penghijauan sehingga pengrusakan hutan dapat dicegah, minimal dapat dikurangi pada tahap yang tidak membahayakan.

Usaha perlindungan tanah dan air perlu adanya keserasian dengan aspek lain khususnya sosial ekonomi unit pengelolaan yang terkecil adalah Daerah Aliran Sungai (DAS). Usaha pengelolaan DAS tersebut perlu dikembangkan dengan mengarah pada tujuan pemulihan, pemantapan pemeliharaan dan mengembangkan kondisi hidro-orologis DAS.

Teknologi pertanian modern cenderung untuk hanya menanam satu atau beberapa varitas unggul saja secara besar-besaran, dikhawatirkan

Irian Jaya is supported only by relatively poor land in addition to simple/traditional and nomadic agricultural pattern. This can become a serious threat to the preservation of natural resources and environment. Besides, there is still illegal tree cutting in cold area, not only for cooking but more than that the trees or firewood is used for heating and this can last more than 12 hours a day. Traditional land for agriculture especially those using dry-agriculture method is endragered by land-fertility decrease dur to erosion and the washing away of top soil by rain.

Land coservation pattern has not yet been widely known in Irian Jaya particularly by people in the hinterlands. Allocation pattern of natural forest resources has not yet at been working well, for thre are still some overlappings in the land allocation due to other sectors importance. Aside from that, there are not enough agriculture and health counsellors in the region. Meanwhile, only 43 out of ± 600 kinds of trees found in Irian Jaya have been studied.

Irian Jaya can ben said as still pure, unpoluted by industrial waste or other kinds of population. It has a great development potential, so it is necessary to take steps in basic policy so every development activity follows the regulations that have been set up to preserve the environment and keep the ecosystem balance. Thus, the exploitation of natural resources and environment can be carried out maximally and everlastingly for the welfare of the people.

For natural resources that can not be renewed the exploitation of which must be conducted optimally and according to the priority that has been caredfully considered. In critical lands and densely populated areas, reforestation and regreening efforts should be intensified through planting the kinds of threes that easily grow and have double values namely they function as land as water protection and the same time also can be utilized by the people in the form of forest products. The most important thing in the regreening effort is that the trees can be supply the need for fuel so that forest destruction can be prevented, at least minimized, to and undengerous level. Efforts to protect the land and water need coordination and other aspectsespecially concerning the smallest social economic management unit namely DAS (River Flow Area). DAS management needs to be developed towards rehabilitation, proper maintenance and promotion of Hydro-orologic of the DAS.

Modern agriculture technology tends to mass-plant one or several prime varieties of seed only. It is feared that traditional varieties which are the germplasm of forestry, agriculture, husbandry and fishery will become extinct.

For that reason it is necessary to protect rare plants and animals especially those with critical population. Big industries should be devided with possibili-

bahwa varitas-varitas tradisional yang merupakan plasma nutfah dari kehutanan, pertanian peternakan dan perikanan makin terdesak dan akan musnah. Untuk itu perlu perlindungan jenis-jenis tanaman/hewan yang langka atau yang sudah gawat populasinya.

Pembagian industri-industri besar sedapat mungkin telah melalui program telaah kemungkinan yang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi dan politik tetapi juga pertimbangan ekologinya yang serius.

Penerapan teknologi yang sesuai ini harus ditunjang oleh rumusan kebijaksanaan yang menjabarkan kriteria-kriteria dan batasan-batasan teknologi, dan dituangkan dalam peraturan-peraturan permainan di masyarakat.

Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) di Irian Jaya dibentuk tanggal 10 Juli 1978 berdasarkan SK No 429/Kpts/019/Kpts/71978 dan baru efektif dilaksanakan pada Pelita III. Di Irian Jaya PPA dibagi menjadi 2 Sub. Balai PPA yaitu : a) Sub Balai PPA Irian Jaya di Sorong dengan 5 sub seksi PPA masing-masing di Sorong, Biak, Manokwari, Serui dan Fak-Fak; b) Sub Balai PPA Irian Jaya di Jayapura dengan 4 Sub Seksi PPA masing-masing di Jayapura, Jayawijaya, Merauke dan Nabire.

Untuk mempermudah dan demi kelancaran pelaksanaan tugas, tiap-tiap Sub sektor PPA dibagi menjadi beberapa Resort PPA. Irian Jaya dengan luas 410.660.000 Ha, hampir 70% masih berupa hutan primer yang kaya dengan ± 10.000 jenis flora dan fauna ± 650 jenis burung dan 125 jenis mamalia yang mempunyai habitat meliputi permukaan laut sampai dengan gletzer.

8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pelaksanaan pembangunan di Irian Jaya adalah untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Demikian pula peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap penelitian sangat besar manfaatnya. Karena perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat membantu dan mengembangkan konsep, teori serta metode penelitiannya. Sedangkan peranannya kepada pembangunan diberbagai sektor tersebut adalah merupakan penunjang dan pendorong untuk memperoleh atau menemukan teori-teori baru yang sangat bermanfaat untuk memecahkan masalah di masing-masing sektor.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang lebih terarah, efisien dan efektif diperlukan untuk memajukan Teknologi Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan serta sektor produksi lainnya agar produktivitasnya dapat bersaing dan lebih meningkat kualitasnya. Berbagai hal akan diperoleh berbagai keuntungan melalui keberhasilan di bidang Teknologi dan Ilmu Pengetahuan. Karena seperti di Irian Jaya dengan kehadiran Universitas Cendrawasih dan Perguruan Tinggi lainnya akan dapat ditingkatkannya secara efisien dan pemanfaatan teknologi tepat guna termasuk teknologi tradisional. Sehingga diharapkan dapat mendukung usaha peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berbagai penelitian di bidang teknologi dan Ilmu Pengetahuan selama Pelita III meningkat, kemudian ditingkatkan lagi dalam Pelita IV. Kegiatan yang dilakukan yaitu berupa penelitian dasar maupun penelitian terpakai yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan. Dari penelitian tersebut juga diprioritaskan terhadap sektor-sektor seperti :

a. Sektor Pertanian : Di sektor ini penelitian yang dilakukan adalah berupa penyelidikan tentang kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian pangan, perkebunan dan peternakan, penyelidikan potensi perikanan, potensi hutan bagi industri kayu dan potensi sagu.
b. Di sektor pertambangan dan energi dilakukan inventarisasi sumber daya mineral, minyak bumi serta inventarisasi potensi sumber daya air. Dari penelitian ini di sektor ini telah ditemukan deposit kapur, marmar, peta sumber daya air yang potensial untuk pembangkitan listrik.
c. Di sektor perhubungan dan pariwisata dilakukan penelitian tentang potensi pariwisata daerah Irian Jaya di 8 lokasi yaitu : Jayapura, Biak, Wamena, Merauke, Agats, Sorong, Fak-Fak dan Manokwari. Disamping itu telah dilakukan penelitian tentang kemungkinan penggunaan sungai Membramo sebagai prasarana perhubungan ke daerah pedalaman.
d. Di sektor perdagangan dan koperasi dilakukan penelitian tentang tata niaga hasil pertanian daerah transmigran.
e. Di sektor tenaga kerja dan transmigrasi dilakukan penelitian tentang penyediaan dan permintaan tenaga kerja di Irian Jaya.

ty study programme which is not based on social, economic and political considerations only but also on a serious ecological consideration.

The application of suiteble technology must be supported by policy formulation which describes the technological criteria end limitation, to be set up in rule of the game in the society.

Environmental Perservation and Concervation Office (PPA) in Irian Jaya was established on July 10,1978 based on SK (Decision Letter) No 429/Npts/019/Kts/71978 and effective during Pelita III. PPA in Irian Jaya is devided in to 2 sub-office of PPA namely: a) PPA sub-office Irian Jaya I in Sorong with its sub-sections in Sorong, Biak, Manokwari, Serui, and Fak-Fak; b) PPA sub-office Irian Jaya in Jayapura with its sub-sections in Jayapura, Jayawijaya, Merauke and Nabire. To facilitate and smoothen the implementation of its tasks, each PPA sub-sector is devided into several PPA Resorts.

Irian Jaya covers an area of 410,660,000 Ha almost 70% of which consist of primary forests which are rich with ± 10,000 kinds of flora and fauna among others around 650 kinds of birds and 125 kinds of mamals. Their habitat covers the sea level until gletzer region.

8. Science and Technology

Science and Technology utilization in the development of Irian Jaya is meant toincrease the benefit coming from the existing natural resources and also to increase people's participation in carrying out the development and making use of its results.

Science and Technology also play an important role in conducting research. Because the development in the fields of Science and Technology can be a great help in expanding the concept, theory and method of the research. While their roles in the development of various sectors are to support and encourage th e discovery of new theories that can be useful in solving the problem in every sector.

Science and Technology which are more efficient, effective and orientated are needed in improving the Technology of agriculture, forestry, husbandry, fishery and other production sectors so that they can be more competitive with better quality. Various benefits will be gained through the success in the fields of Science and Technology. For Irian Jaya, where there are Cendrawasih University and other universities, effective technology can be developed efficiently including traditional technology. It is expected to support the effort in increasing production, opening more job opportunity, creating equitable distribution of income, and conserving natural resources and environment. Various research in the fields of Sci nce and Technology are blooming during Pelita III and were further increased in Pelita IV. Research activities that have been conducted include, among others, oceanographic survey and applied survey related to the implementation of devevelopment. The research priority is given to the following sectors:

a. Agricultural Sector: In this sector research has been conducted to examine the land and find out wether it is suitable or not for developing food-crops agriculture, plantation and husbandry, and also other research in surveying the potentials of fishery, forestry for wood industry, and sago.
b. In the Mining and Energy sector, inventory has been carried out in mineral resources, oil, and water resources. Surveys in this sector have discovered lime deposit, marble deposit and the map of water resources which are potential for generating electricity.
c. In the sectors of communication and tourism, research has been conducted on the tourism potential in Irian Jaya in 8 locations namely : Jayapura, Biak, Wamena Merauke, Agats, Sorong, Fak-Fak and Manokwari. Apart from that, some surveys have also been carried out to see the possibility of using Membramo river as transport means to the hinterland.
d. In the sectors of trade and cooperatives, research has been conducted on agricultural products trade regulations in resettlement area.
e. In the sectors of manpower and transmigration, the research conducted dealed with supply and emand of manpower in Irian Jaya. While in transmigration sector, surveys have been carried out on land-suitability, layout and transmigration.
f. In the sectors of region, village and city there have been some research conducted in effort to set up a master plan for 9 districts capitals in Irian Jaya including its layout and territorial development.
g. In the sectors of education and culture, research has been conducted on language, and art of Irian Jaya region.
h. In the sector of statistics there has been a research conducted in effort to complete date and information for the implementation of development in Irian Jaya.

Sedangkan sektor transmigrasi penelitian dilakukan dalam rangka penyiapan lahan pemukiman transmigrasi berupa penelitian tentang kesesuaian lahan, penelitian tata ruang dan transmigrasi.

f. Di sektor daerah, desa dan kota telah dilakukan penelitian dalam usaha penyusunan rencana induk bagi 9 ibukota kabupaten di Irian Jaya, juga termasuk tentang tata ruang dalam pengembangan wilayah.
g. Di sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan penelitian tentang bahasa, kesenian di daerah Irian Jaya.
h. Di sektor statistik dilakukan penelitian dalam usaha melengkapi data dan informasi bagi pelaksanaan pembangunan di Irian Jaya.

Keseluruhan kegiatan penelitian yang telah dilakukan di Irian Jaya ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dari Perguruan Tinggi UNCEN, IPB Bogor, Universitas Brawijaya Malang, LIPI, BPPT, Balai Penelitian Gula, Konsultasi dalam negeri seperti Konsultan Harimurthi, Fedicinal, Tricon dan Konsultan Asing seperti NEDECO, EUROCONSULT, dan sebagainya.

Dalam Pelita IV penelitian dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi masih terus dilanjutkan dengan penajaman prioritas seperti Penelitian Pertanian dan Pengairan, Pertambangan, Perhubungan Perintis, Transmigrasi dan lain-lain.

Penelitian pertanian yang dilaksanakan mencakup komoditi tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, dan penelitian masalah lintas sektoral antara lain agro ekonomi, sumber daya alam, dan transmigrasi terangkum dalam berbagai penelitian.

9. Hukum dan Kamtibmas

Sejak Pelita I sampai Pelita III pembangunan dan pembinaan Hukum diarahkan pada penciptaan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan. Juga upaya pemantapan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan peranannya serta meningkatkan citra dan wibawa hukum melalui aparat penegak hukum serta menyelenggarakan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu juga diadakan penataran dan penyuluhan hukum kepada aparat pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta mengadakan pengawasan dan pengamanan terhadap orang asing di masing-masing daerah.

Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di darat maupun di laut adalah merupakan pertanda kurangnya kesadaran hukum. Demikian pula penerapan sanksi peraturan perundangan di daerah ini masih langka.

Di Irian Jaya pelaksanaan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Keagrariaan belum dapat diterapkan. Hukum tanah dan hukum adat di daerah Irian Jaya masih menjadi patokan yang utama. Kewenangan dari persekutuan hukum adat dalam mengelola tanah di Irian Jaya adalah bahwa wewenang dari persekutuan hukum adat untuk menguasai atas tanah beserta tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang liar dan lain-lain. Ada kewajiban-kewajiban dari persekutuan hukum adat terhadap tanah beserta isinya untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku. Serta warga persekutuan hukum adat dalam menguasai tanah beserta tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang liar dan lain-lain bukan memiliki, melainkan menguasai.

Yang jelas, dalam masyarakat Irian Jaya yang dikenal dengan tiap-tiap persekutuan hukum adat, mereka itu mempunyai suatu kekuasaan untuk mengelola atas tanah secara hukum adat yang berlaku.

Oleh karena itulah kegiatan pembinaan di sektor hukum ini secara bertahap terus diupayakan kualitas dan kuantitasnya. Sebagai kelanjutan dari Pelita III, dalam Pelita IV masih terus dilakukan pembangunan fisik peradilan, pemasyarakatan yang merupakan penunjang pencapaian kesadaran dan kepastian hukum. Demikian juga mengupayakan untuk meningkatkan mutu personil penegak hukum.

Perbaikan sistem pembinaan bagi narapidana baik dalam lembaga maupun di luar lembaga juga terus dilakukan secara intensif. Termasuk didalamnya upaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dianggap penting mengingat mereka diharapkan dapat sesegera mungkin berbaur dengan masyarakat secara baik dan wajar.

Pembangunan unit peradilan di Irian Jaya diarahkan untuk peningkatan kemampuan para aparat pengadilan, melalui penataran-penataran, peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Pembangunan unit pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan usaha pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, hal ini dapat dicapai dengan adanya aparat/pegawai yang berkemampuan tinggi, baik pengetahuan maupun mental spiritual. Usaha ke arah tersebut dilaksanakan melalui berbagai penataran tenaga teknis pemasyarakatan.

All research activities carried out in Irian Jaya are conducted by Research Institutions from Cendrawasih University, IPB Bogor Agricultural Institute, Brawijaya University Malang, LIPI (Indonesian Science Institution), BPPT (Agency for the application of technology), Sugar Research Centre, domestic consultants like Harimurthi, Pedicinal, and Tricon, and also foreign consultants such as NEDECO, EUROCONSULT and others.

During Pelita IV, researches in the field of Science and Technology have been carried on with specifict priority such as in the fields of agriculture and irrigation, mining, pioneer communication, transmigration and so on.

Agricultural research that has been conducted covers various commodities like food-corps, plantation, fishery, husbandry and surveys on sectoral lines, among others on agro-ecnomomy, natural resources and transmigration.

9. Law, Security and Order

Starting from Pelita I until Pelita III, Law development and promotion were directed towards a stable condition, so that every member of the society could enjoy a situation with law certainty and order based on justice. to stabilize the role and function of law enforment and to increase its authority and image through law apparatuses, and also to give legal aid for those can not affort to pay for it. On the other hand, training and counselling have also been given to the government apparatuses on the law and also to penitentiaries or prisons officials. Besides, necessary supervion concerning foreigners in each region has been taken for security reasons.

Road and sea accidents which often happen indicated lacking in law-awareness. In this region, application of sanctions according to law regulations is rare.

The implementation of Law No 5 of 1960 on Basic Principles of Agrarian Affiar has not yeat been able to be applied in Irian Jaya. Land-law and customary law in Irian Jaya have still become the main standard. The authority of customary law alliance in managing land in Irian Jaya is also the authority to take charge of the land including the trees, plants, and wild animals etc. There are some obligations on the side of customary law alliance to take care of the land and its contents and to obey the recognized regulations. All members of the customary law alliance do not own the land, they only are in charge to care of it.

In short, people in Irian jaya who are known for their customary law alliances, have some kinds of authority to manage the land according to the customary law.

For that reason, efforts and activities in the promotion of Law sector are continually being stepped up both in quantity and quality. As the continuation of Pelita III, during Pelita IV physical development on law facilities such as the construction and expansion of court buildings and prisons have been continued since they support the effort to achieve law awareness and certainty. While the non-physical development is carried out by improving the quality of law enforcement.

Improvement in guidance system for inmates in prison as well as outside has kept on being carried out intensively. This include efforts to supervise and give guidance them in the society. This is considered as very important because they are expected to integrated in the society naturally.

Development of justice unit in Irian Jaya is directed towards improving the ability of justice apparutes, through training and courses, and improving justice facilities and infrastructures.

Development of socializing institutions (prisons) is carried out by giving guidance to the inmates and juvenile delinquents by officers who are highly capable both mentally and spitually and also with good knowledge. Efforts to materialize it have been carried out through courses given to the technical officers of prisons.

Development of imigration unit in Irian Jaya is directed toward efforts to serve imigration traffic in Irian Jaya. A policy has been taken to improve the quality and knowledge of imigration officers, to complete the imigration physical facilities, with communication deveices and patrol boats in Biak and Merauke. With continuous efforts, it is hoped that better service can be given for both Indonesian citizens and foreigners.

During the period of Pelita I until Pelita III, activities in the fields of security and order are carried out by improving the quality and personnel by giving training and education for HANSIP (Civil defence) personnels and MENWA (Students Regiment). These are meant to improve technical knowledge in the operational total people's defence and security to support the implementation and safeguarding the results of development.

To materialize the objectives and target in the fields of security and order in IrianJaya, during Pelita IV, efforts have been carried out to make people realize their duty to defend the country and to increase active roles of Civil Defence institutions such as HANSIP and MENWA within regional scope and to intensify Community Protection System (SISKAMLING) for rural people.

Pembangunan unit imigrasi di Irian Jaya diarahkan pada usaha pelayanan lalu lintas keimigrasian di Irian Jaya. Kebijaksanaan peningkatan mutu pengetahuan para pejabat imigrasi, penyempurnaan sarana fisik imigrasi, peralatan komunikasi, pengadaan kapal patroli bandar dan di Biak dan Merauke, yang terus berlanjut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan baik bagi warga negara Indonesia maupun asing.

Di Irian Jaya dalam Pelita I sampai III kegiatan di bidang kamtibmas dilakukan upaya peningkatan mutu dan personal seperti pendidikan dan latihan bagi HANSIP dan MENWA. Semuanya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknik operasional pertahanan keamanan rakyat semesta dalam rangka mendukung pelaksanaan serta pengamanan hasil-hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kamtibmas di Irian Jaya dalam Pelita IV ditempuh upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam kewajiban membela negara serta meningkatkan peran aktif lembaga-lembaga keamanan sipil seperti Hansip dan Menwa diruang lingkup daerah serta menggalakkan SISKAMLING bagi warga pedesaan.

Kemudian yang tidak ketinggalan adalah upaya untuk meningkatkan prasarana fisik dan sarana penunjang berupa kantor, pos Hansip, pakaian seragam hansip serta segala perlengkapannya. Demikian juga upaya untuk memantapkan pembinaan pertahanan sipil secara bertahap melalui pembinaan organisasi sehingga dapat berkembang sampai ke seluruh lapisan masyarakat yang diperoleh melalui pendidikan.

Pendidikan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk membantu menanggulangi dan memperkecil akibat bencana dan memperkuat pelaksanaan HANKAMNAS, membantu POLRI dalam pelaksanaan operasi KAMTIBMAS yang diperlukan menurut tingkat keadaan, serta membantu ABRI dalam tugas operasi militer baik berupa pertahanan maupun keamanan.

10. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial

Secara umum fungsi Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Irian Jaya menyangkut penyelenggaraan operasi penerangan yang disalurkan melalui media penerangan Pemerintah. Baik komunikasi massa maupun media tradisional. Disamping itu kegiatan lain menyelenggarakan kegiatan penerangan langsung terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan serta menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan unsur-unsur penerangan rakyat; memberikan bimbingan, pengarahan dan penyuluhan kegiatan penerangan yang dilakukan oleh Kantor Departemen Penerangan Kabupaten dan Kotamadya serta PUSPENMAS; penampung masalah gejolak/pendapat di daerah masing-masing untuk diteruskan kepada pimpinan Departemen Penerangan sebagai laporan umpan balik; dan melakukan pembinaan dan pengamatan terhadap kegiatan penerangan yang dilakukan oleh lembaga komunikasi masyarakat non Pemerintah di bidang keradioan, pertelevisian, perfilman dan persuratkabaran.

a. Penerangan Umum

Kegiatan operasional penerangan tatap muka yang dilaksanakan di Irian Jaya baik oleh Kantor Wilayah Departemen Penerangan Kabupaten dalam bentuk ceramah, rapat-rapat, dialog, anjangsana mobil unit maupun muviani. Kemudian melalui kegiatan pertunjukan film dokumenter, Penerangan memegang peranan penting karena melalui media ini tingkat penyerapan pesan-pesan yang disampaikan jauh lebih intensif. Pertunjukan film dokumenter dilaksanakan setiap ada kegiatan operasi penerangan. Lihat Tabel IV-28

Bentuk-bentuk pertunjukan rakyat yang dilaksanakan dalam rangka menunjang mission penerangan antara lain : Sosio Drama, Tarian Daerah/Adat, Vocal Group.

Dalam kegiatannya, Kantor Wilayah Departemen Penerangan dalam bentuk group-group sosio drama baik ditingkat Kanwil maupun di seluruh Kantor Deppen Kabupaten. Dalam rangka festival drama tingkat regional I di Manado bulan Agustus 1982 Irian Jaya diwakili oleh Group Sosio Drama AIMANDO '81 Kantor Deppen Kabupaten Teluk Cendrawasih dan berhasil keluar sebagai juara II.

Sebagai kelanjutan dari tingkat regional, pada tingkat Nasional yang diadakan pada bulan Januari 1983 group AIMANDO '81 menduduki pada urutan ke VIII. Disamping group intern, Kanwil Deppen Propinsi Irian Jaya juga membina group-group extern seperti, di Jayapura dengan group Theater Jayapura Kristen juga ditingkat Kabupaten sudah dilaksanakan.

Kegiatan penerangan yang disampaikan lewat media radio, televisi dan surat kabar masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan sehingga untuk mencapai sasarannya pengetahuannya masih rendah diperlukan suatu media yang efektif.

Other efforts have also been carried out to increase the infrastructure and supporting facilities such as offices, Hansip posts, Hansip's unifor and attribures. Besides, there are efforts to stabilize civil defence promotion by stages through organisational promotion that can be developed to reach all layers of society by means of educations.

The education or courses is meant to protect the society and to overcome or minimize the effects of disasters and to strengthen the implementation of HANKAMNAS (national defence and security), help POLRI (Police) in carrying out KAMTIBMAS (Society's defence and security) operation according to situation, and also to help ABRI (Armed forces) in military operation in the field of defence and security.

10. Information, Press and Social Communication

In general, the function of Irian Jaya Regional Office of the Information Ministry is related to the implementation of information operations channeled through the government's information media. Both mass communication and traditional media as well. Besides, there also some information activities directly conveyed to urban society and fostering cooperation with people's information elements; giving guidance, directives and counselling on information activities carried out by Information Ministry Regional Office in Districts and municipatilities and PUSPENMAS (Society Information Centre), taking note on problems and opinion of the regions to be furthered higher officials of the Information Ministry as feedback report; and promoting and observing information activities carried out by non-governmental mass communication institutions in the fields of radio, television, film and newspaper.

a. General Information

Operational activities of face to face information carried out in Irian Jaya by the Regional Office of Information in the districtsd comprising lectures, meetings, dialogues, visits by unit cars and muviani. The role of documentary films shows are important because through this media the messages can be conveyed to the people more intensively. Documentary films are always shown during information operational activities. See Table IV - 28

People's performances that have been staged to support the information mission are among others; Socio-drama, Traditional/Regional dances, Vocal Group.

In its activities, the Regional Office of Information Ministry has established socio-drama groups both in the regional level as well as in the district level. During a Regional Drama Festival held in Manado in August 1982, Irian Jaya was represnted by AIMANDO '81 Socio-Drama group of Cendrawasih Bay District Office of Information which succeeded in grabbing the second place.

As the continuation of the regional festival, a national level festival was held in January 1983 and AIMANDO '81 group in the eight position. Besides internal groups, the Regional Office of Information Ministry also promotes external groups like for instance in Jayapura with Jayapura Christian Theather group, and also in the districts.

Information activities carried out through the media of radio, television and newspapers have their own advantages and disadvantages in achieving the target namely rural people whose level of education is relatively low. It is necessary to have and effective medium to reach them. The medium is called Information Officer. Messages coveyed through the other three media will be explained by the Information officer in simple language to the rural people. In connection with this, Regional Office of Information Ministry in Irian Jaya has stationed 70 information officers in sub-districts of the province who are equiped with land and sea MUVIANI according to condition of the assigned location.

b. Radio Republik Indonesia (RRI)

For the success of information mission in all districts of Irian Jaya, an RRI Radio Station has been established which broadcasts both Nusantara programme and Regional programme and relays National programmes. RRI Jayapura Station is also known as RRI Nusantara V and located in Jayapura with transmission area covering Maluku and Irian jaya provinces. It also coordinate the network of RRI Regional stations namely in Fak-Fak, Manokwari, Serui, Wamena, and Nabire.

Rural broadcast is given first priority since it is meant to help rural people who are mosthly farmers and fishermen in solving their problems. The programme is broadcast in local dialect so that can be easily understood by public in general. See Table IV - 29

Besides rural broadcast, educational programme is also one of the favourite programmes and is considered very useful especially in helping teachers in the hinterland to step up their knowledge. New report meanwhile is broadcast to give information to the rural people on the activities of the Central Government in connection with the progress of development in the region as well as in all parts of the country.

RRI Nusantara V since September 1,1983 has started a 24-hour (around the clock) transmission, through RRI Ambon, RRI Sorong, and RRI Ternate.

Tabel / *Table IV — 28*

DATA PENEMPATAN PESAWAT TV UMUM, RADIO CASSETTE DAN MESIN GENERATOR DI PROPINSI IRIAN JAYA 1976 - 1983
DATA ON THE PLACING OF PUBLIC TV, RADIO, CASSETTE, AND GENERATORS IN IRIAN JAYA PROVINCE 1976 - 1983

No.	Kanwil Deppen/ Kandeppen Kab. *Information Regional Office District Office*	Nama Media *Name of Medium*			Muviani		
		TV Umum *Public TV*	Radio Cassette *Cassette*	Generator *Generator*	Darat *On Land*	Laut *At Sea*	Jumlah *Total*
1.	Kanwil Deppen Prop *Provincial Information Office*	101	109	18	22	1	251
2.	Jayapura	69	63	23	12	2	169
3.	Jayawijaya	40	163	17	5	-	225
4.	Fak-Fak	34	55	10	10	1	110
5.	Merauke	46	59	13	12	2	131
6.	Sorong	54	59	27	12	2	154
7.	Manokwari	61	55	18	12	2	148
8.	Yapen Waropen	26	53	14	5	2	100
9.	Teluk Cendrawasih	60	46	18	9	2	135
10.	Paniai	21	47	9	8	1	86

Sumber data : Kanwil Dep Penerangan Propinsi Irian Jaya.
Data source : Regional Office of Information Irian Jaya Province.

Media tersebut adalah para Juru Penerangan, agar pesan yang disampaikan lewat ketiga media tersebut sudah dicerna oleh masyarakat pedesaan dengan bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami, maka peranan Jupen sangat dibutuhkan. Sehubungan dengan itu, Kanwil Deppen Propinsi Irian Jaya telah menempatkan Juru-juru Penerang Tingkat Kecamatan sebanyak 70 orang di seluruh Propinsi Irian Jaya dilengkapi dengan MUVIANI darat dan laut disesuaikan dengan kondisi lokasi tugasnya.

b. Radio Republik Indonesia (RRI)

Demi suksesnya misi penerangan di seluruh Kabupaten di Irian Jaya sudah ada stasion RRI yang senantiasa melaksanakan program siaran Nusantara dan program siaran Regional serta kegiatan merelay siaran-siaran Nasional. RRI Stasion Jayapura merupakan RRI Nusantara V berkedudukan di Jayapura dan mempunyai wilayah siaran meliputi Propinsi Maluku dan Irian Jaya dengan mengkoordinasikan jaringan stasion-stasion RRI Regional I yaitu RRI stasion Fak-Fak, Manokwari, Serui, Wamena dan Nabier.

Kegiatan yang lebih banyak waktunya adalah siaran pedesaan yang setiap kali menyampaikan penjelasan pemecahan masalah-masalah yang sangat diperlukan masyarakat pendengar yang sebagian besar terdiri dari para petani dan nelayan. Siaran ini menggunakan dengan bahasa rakyat sehingga mudah ditangkap dan dimengerti oleh masyarakat umum. Lihat Tabel IV-29

Selain siaran pedesaan, juga siaran pendidikan merupaan salah satu program siaran yang banyak penggemarnya serta besar manfaatnya teristimewa bagi para pendidik yang bertugas di pedalaman. Dalam siaran ini juga disiarkan Kursus Pendidikan Guru (KPG) yang bisa membantu para guru untuk meningkatkan pengetahuannya. Siaran warta berita juga merupakan informasi untuk memberikan kegiatan dari pusat sampai ke pedesaan dalam hal perkembangan pembangunan baik di sendiri maupun di seluruh tanah air.

RRI WIlayah Nusantara V terhitung mulai tanggal 1 September 1983 telah melaksanakan siaran 24 jam, yaitu RRI Ambon, RRI Sorong dan RRI Ternate. Sedang stasion lainnya termasuk RRI Jayapura maksimum baru dapat dilaksanakan siaran selama 20 jam per hari.

Adapun jumlah kekuatan pemancar di wilayah Nusantara V sebesar 1.545 kilowatt untuk keperluan siaran. Disamping itu masih terdapat pula 255 kilowatt pemancar untuk keperluan komunikasi baik SBB maupun STL. Untuk meningkatkan pelayanan, RRI Nusantara V Jayapura telah membangun gedung kantor dan lantai seluas 2.000 M2. Gedung RRI yang dibangun adalah RRI Biak, RRI Merauke dan RRI Ambon.

c. Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Media Televisi merupakan salah satu media penerangan yang pada saat ini merupakan primadona di dalam menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pesawat penerima televisi merupakan atau bersifat audio visual dengan fungsinya sebagai alat penerangan, pendidikan dan hiburan.

Dalam usaha meningkatkan arus informasi sampai di pedesaan maka Deppen telah menyempurnakan dan meningkatkan mutu dan sistem

Tabel / *Table IV — 29*

JUMLAH JAM SIARAN STATION RRI
TOTAL BROADCASTING HOUR OF RRI STATIONS

RRI Station *RRI Station*	Jumlah Siaran *Total broadcasting time*		Keterangan *Explanation*
	Sehari *A Day*	Seminggu *A week*	
1. Jayapura	60 menit/ *60 minutes*	450 menit/ *450 minutes*	15 x seminggu termasuk ulangan *15 x a week including rebroadcast*
2. Biak	30 menit/ *minutes*	120 menit/ *minutes*	4 x seminggu termasuk ulangan *4 x a week including rebroadcast*
3. Merauke	30 menit/ *minutes*	90 menit/ *minutes*	3 x seminggu termasuk ulangan *3 x a week including rebroadcast*
4. Sorong	60 menit *minutes*	360 menit *minutes*	12 x seminggu *12 x a week*
5. Manokwari	30 menit *minutes*	120 menit *minutes*	4 x seminggu *4 x a week*
6. Fak-Fak	30 menit *minutes*	180 menit *minutes*	6 x seminggu *6 x a week*
7. Serui	15 menit *minutes*	15 menit *minutes*	1 x seminggu *1 x a week*
8. Nabire	30 menit *minutes*	210 menit *minutes*	7 x seminggu *7 x a week*
9. Wamena	30 menit *minutes*	60 menit *minutes*	2 x seminggu *2 x a week*
10. Ambon	45 menit *minutes*	225 menit *minutes*	7 x seminggu *7 x a week*
11. Ternate	60 menit *minutes*	420 menit *minutes*	7 x seminggu *7 x a week*

Sumber data : Kanwil Dep Penerangan Propinsi Irian Jaya.
Data source : Regional Office of the Information Ministry, Irian Jaya province.

While other stations including RRI Jayapura only have the maximum broadcasting capacity of 20 hours per day.

Total transmitters' power in Nusantara V Region is 1,543 kilowatt for radio broadcast. Besides, there is also a 255 kilowatt transmitter for communication means, SBB as well as STL. To improve service, RRI Nusantara V Jayapura built a two storeyed office covering an area of 2000 M2. Other RRI buildings have been constructed for RRI Biak, RRI Merauke and RRI Ambon.

c. Televisi Republic Indonesia (TVRI)

Television is an information medium which has become very popular and important currently in conveying the Government's messages to both rural and urban people. A television set with its audio visual characteristics has the function as the medium to bring in information, education and entertainment.

To increase the flow of information to rural area the Information Ministry has improved the quality and system of television broadcast transmitted by

siaran TVRI stasion Pusat Jakarta sejak 1 April 1981 yang sangat membantu kegiatan penerangan di Irian Jaya terutama kegiatan di pedesaan seperti KUD, Transmigrasi serta keberhasilan usaha-usaha pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat dan didengar oleh seluruh masyarakat Irian Jaya, maka Departemen Penerangan telah mendirikan beberapa Stasion Relay di Irian Jaya seperti : Jayapura, Wamena, Merauke, Biak, Manokwari, Sorong, Paniai, Serui dan Fak-Fak. Lihat Tabel IV-30.

Tabel / *Table IV — 30*

JUMLAH PESAWAT TV YANG TERDAFTAR DI IRIAN JAYA 1980 S/D 1983
TOTAL REGISTERED TV SETS IN IRIAN JAYA 1980 UP TO — 1983

No	Jenis T.V. *Type of TV*	1980	1981	1982	1983
1.	Hitam Putih/ *Black and White*	6.961	8.754	11.379	16.897
2.	Berwarna/ *Coloured*	247	1.233	2.917	7.133
	Jumlah / *Total*	7.208	9.987	14.296	21.020

Sumber : KD Pos Wilayah XII Irian Jaya.
Source : Regional Post Office XII Irian Jaya.

d. Pers dan Grafika

Selain media tersebut terdahulu peranan pers juga sangat menentukan keberhasilan penerangan di Irian Jaya.

Percetakan sebagai alat atau piranti keras untuk menunjang kegiatan operasional penerangan telah mencetak dan mempublisir bahan-bahan penerangan. Percetakan Negara Jayapura sudah ada sejak Pemerintah Belanda dengan nama **Laands Drukkery** sampai tahun 1963 berubah nama dengan Percetakan Negara dan dikelola oleh Departmen Penerangan sampai sekarang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan di Irian Jaya maka pada tahun 1964, 1965 dan 1967 Departemen Penerangan telah membuka Percetakan Negara masing-masing di Biak, Manokwari, dan Merauke.

Karena kemajuan pers di Irian Jaya belum begitu berkembang maka suratkabar atau majalah yang banyak menguasai pembaca di daerah ini masih terbitan luar terutama pers ibukota. Koran untuk desa yang dikirim langsung dari Pusat (Jakarta) ke sembilan Kabupaten di Irian Jaya tujuannya agar koran tersebut dapat diteruskan ke tingkat kecamatan dan desa melalui para Jupen di Kecamatan. Lihat Tabel IV-31.

Kegiatan penerangan yang langsung dalam bentuk penerangan adalah memuat pesan-pesan penerangan mengenai program pemerintah pusat dan daerah serta menyebarluaskan peristiwa-peristiwa bersejarah dalam ruang lingkup nasional maupun daerah.
Penerbitan dalam bentuk brosur maupun bulletin adalah :
1) Tinjauan Opini, 350 expl. Kanwil Deppen Propinsi Irian Jaya.
2) Warta Pembangunan, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Jayapura.
3) Membangun, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Jayawijaya.
4) Suara Merauke, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Merauke.
5) Dian Karya, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Teluk Cendrawasih.
6) Saireri, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Yapen Waropen.
7) Suara Paniai, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Paniai.
8) Mingguan Pelita, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Manokwari.
9) Warta Sepekan, 350 expl. Kantor Deppen Kabupaten Sorong.
10) Maak Keor, 359 expl. Kantor Deppen Kabupaten Fak-Fak.

Selain itu, juga telah mengelola dan mendistribusikan koran untuk desa yaitu surat kabar harian Angkatan Bersenjata dan koran masuk desa untuk pertama kali bagi Irian Jaya dipercayakan kepada surat kabar untuk Harian Cendrawasih.

e. Perfilman

Pemutaran film komersial diberbagai bioskop, selain berperan sebagai hiburan sehat juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan kepada masyarakat berupa penyampaian pesan melalui slide.
Jumlah gedung bioskop yang ada di Irian Jaya sebagai berikut :

- Jayapura	5 buah
- Biak	4 buah
- Manokwari	3 buah
- Sorong	10 buah
- Fak-Fak	1 buah
- Serui	1 buah
- Nabire	2 buah
- Wamena	1 buah
- Merauke	2 buah

TVRI Central Station Jakarta starting April 1,1981. This has become a great help in carrying out the information activities in Irian Jaya especially these in rural area such as KUD (Rural Cooperative), Transmigration and the success in agriculture, husbandry, plantation and fishery. In order to make these activites can be seen and heard by all Irian Jaya people, the Information Ministry has established several television relay stations in Irian Jaya such as in Jayapura, Wamena, Merauke, Biak, Manokwari, Sorong Paniai, Serui, and Fak-Fak. See Table IV — 30

d. Press and Graphics

Besides the above mentione media, the role of press is quite decisive in achieving information success in Irian Jaya.

Printing Office as the hardware has supported information materials. Jayapura State Printing Office was establisned during the Dutch colonial time and was named Laands Drukkery. In 1963 the name was changed into Stated Printing Office and has since been managed by the Information Irian Jaya, in 1964, 1965 and 1967 the Information Ministry established state printing office in Biak, Manokwari and Merauke.

Since press in Irian Jaya has not yet been developing fastly, newspapers and magazines which dominate the region are those published outside particulaly in Jakarta. Newspapers for rural area are sent directly from Jakarta to nine districts in Irian Jaya to be furder sent to sub-districts and villages by information officers in the subdistrict. See Table IV-31.

Tabel / *Table IV — 31*

DISTRIBUSI SURAT KABAR HARIAN AB SEBAGAI KORAN MASUK DESA
DISTRIBUTION OF "AB" NEWSPAPERS RURAL NEWSPAPERS

No	Kanwil/Kandeppen Kabupaten *Regional/District Information Office*	Jumlah Expl *Total copy*
1.	Kanwil Deppen Prop Irja/ *Regional Information Office Irian Jaya province*	5 expl. *5 copies*
2.	Jayapura	40 expl/40 copies
3.	Jayawijaya	30 expl/30 copies
4.	Teluk Cenderawasih	30 expl/30 copies
5.	Paniai	30 expl/30 copies
6.	Yapen Waropen	40 expl/40 copies
7.	Merauke	40 expl/40 copies
8.	Sorong	40 expl/40 copies
9.	Manokwari	40 expl/40 copies
10.	Fak-Fak	40 expl/40 copies
	Jumlah / *Total*	335 expl.

Sumber data : Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Irian Jaya
Data source : Regional Information Office Irian Jaya province.

Direct Information activities in the form of publications contain information messages on the central and regional governments' programmes and also help diseminating historical happenings covering both the regional and national scopes.
Brochures and bulletin that have been published :
1). Opinion Observation 350 copies Regional Information Office Irian Jaya province.
2). Development News 350 copies District Information Office Jayapura.
3). Developing 350 copies District Information Office Jayawijaya
4). Suara mearuke 350 copies District Information Office Merauke
5). Dian Karya 350 copies District Information Office Cendrawasih Bay
6). Saireri 350 copies District Information Office Yapen Waropen
7). Suara Paniai 350 copies District Information Office Paniai
8). Pelita Weekly 350 copies District Information Office Manokwari
9). Week in Review 350 copies District Information Office Sorong
10). Maak Keor 359 copies District Information Office Fak-Fak

Besides, also manages and distribute rural newpapers namely Armed Forces newpapers and other rural newspapers which for the first time has been enstrusted to Cendrawasih Daily.

e. Film

Commercial film shows in various cinemas besides providing entertainment can also be used to give information to the people by conveying messages through slides. Total cinems in Irian Jaya :

— *Jayapura*	*5*
— *Biak*	*4*
— *Manokwari*	*3*
— *Sorong*	*0*
— *Fak-Fak*	*1*
— *Serui*	*1*
— *Nabire*	*2*
— *Wamena*	*1*
— *Merauke*	*2*

BAB / CHAPTER V

IRIAN JAYA MENYONGSONG HARI ESOK
IRIAN JAYA WELCOMES THE FUTURE

"BAGI siapa saja yang baru pertama kali datang ke Irian Jaya dewasa ini mungkin saja bertanya kemajuan apakah kiranya yang sudah diperoleh sampai sekarang melalui program pembangunan karena sebagian besar wilayahnya masih hutan belantara. Sebaliknya bagi orang yang sudah pernah bergumul dengan alam di Irian Jaya, entah dalam kesempatan perjuangan mengembalikan Propinsi ini ke Ibu Pertiwi atau pelaksana-pelaksana Pembangunan yang telah mempertaruhkan tenaga dan pikirannya tentu dapat berbangga diri sekalipun masih banyak tantangan, namun menyongsong hari esok yang lebih baik masih penuh harapan".

Yang penting diketahui sekarang bahwa Propinsi Irian Jaya tidak beda dengan Propinsi lain karena Irian Jaya adalah milik seluruh Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gubernur Irian Jaya **Izaac Hindom** mengemukakan itu dalam satu wawancara dengan Tim Indonesia Membangun Sahat Nainggolan dan Asmi Indra di Ruang Kerjanya, 24 Desember 1986.

Izaac Hindom merupakan seorang Putra Irian Jaya yang mulai meniti karier di Pemerintahan dari tingkat bawah. Dari pegawai yang diperbantukan kepada Residen Fak-Fak pada tahun 1954, kemudian diperbantukan kepada Distrik KOKAS dan masih dalam tahun yang sama diperbantukan pada HPB Fak-Fak. Maret 1958 diangkat menjadi Tb HPB Fak-Fak. Tiga bulan dalam jabatan ini, pada bulan Juli 1958 diangkat sebagai **Berstuur Asisten.** Bulan Februari 1960 menjabat Kepala Distrik Teluk Arguni (Kaimana). September 1962 menjadi Tb Residen Fak-Fak, kemudian pada bulan Juni 1963 KPS Teminabuan.

Setelah 2 tahun Irian Jaya kembali kepangkuan Ibu Pertiwi, tahun 1965 bulan Juli Izaac Hindom diangkat menjadi BPH Propinsi Irian Jaya yang berkedudukan di Jakarta. Pada bulan Oktober 1971 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai anggota BPH, kemudian diangkat menjadi anggota DPR RI dan sekaligus sebagai anggota MPR RI berdasarkan SK Presiden RI No 103/M tahun 1977 tertanggal 19 September 1977. Tanggal 22 Nopember 1980 Izaac Hindom kembali memegang jabatan eksekutif sebagai Wakil Gubernur KDH Propinsi Irian Jaya. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1982 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur KDH Propinsi Irian Jaya. Berdasarkan SK Presiden RI No 194/M tahun 1982 pada tanggal 12 Nopember 1982 Izaac Hindom diangkat menjadi Gubernur KDH Propinsi Dati I Irian Jaya. Dengan latar belakang pengalaman yang panjang ini dalam bidang pemerintahan dan pendidikan kini Gubernur Irian Jaya Izaac Hindom setahap demi setahap menata pembangunan di Irian Jaya menuju siap tinggal landas pada pelita-pelita mendatang.

Terhadap setiap tamu yang datang ke Irian Jaya dan menanyakan tentang pembangunan di Irian Jaya, Gubernur Izaac Hindom selalu menegaskan bahwa kita di Republik Indonesia yang dicintai ini adalah ibarat satu keluarga besar yang mempunyai meja makan. Ia mengumpamakan Indonesia merupakan keluarga besar dengan 27 meja makan. Kepala Rumah Tangga sudah lebih dahulu menyusun menu apa untuk hari ini, untuk besok atau satu minggu. Atau makan apa pagi ini, tengah hari dan malam hari. Oleh karena itu Presiden RI tidak perlu mendatangi setiap meja untuk diberi pengarahan. Demikian halnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia menurut Gubernur yang di tahun 1955 menjabat Kepala Distrik Teluk Etna ini, semuanya sudah merupakan Produk MPR RI dan merupakan keputusan dari seluruh rakyat Indonesia. Gubernur dengan seluruh aparatnya sampai di pedesaan adalah merupakan tangan Presiden sebagai Mandataris MPR dalam melaksanakan program-program yang telah digariskan dengan ketetapan MPR.

Jadi sebagai Gubernur ia berkewajiban berusaha agar Propinsi Irian Jaya dapat memenuhi keinginan masyarakatnya yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan yang mendasar dan dalam upaya meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu setiap program yang akan dilaksanakan di Irian Jaya yang diutamakan hal-hal yang sangat mendesak. Program-program pembangunan itu lebih dahulu ditelitinya sungguh-sungguh baru menetapkan program yang menurut dia betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasari kepada banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

"Yang pokok adalah bagaimana alam Irian Jaya ini bisa diharapkan sebagai sumber kemakmuran dan bukan sebaliknya menjadi sumber dari kemelaratan. Bagaimana sumber dari alam Irian Jaya ini dapat memberikan fungsi yang menguntungkan bagi masyarakat di sekitarnya". Kata Gubernur yang penah juga menjadi Tb HPB Kaimana

"WHOEVER comes for the first time to Irian Jaya today may possibly ask about the achievement of the development of the Development Programme in this area up to this present time for the greatest part of the area consists of the dense forest. On the contrary, those who were once faced with the nature of Irian Jaya, whether it was during the struggling times to put this area back in the lap of the father-land or during implementing the Programme of Development, by pledging their bodies and mind, would surely be proud of it because however plentiful is the barrier, there is still a promising and better future to welcome".

One important thing to know by now is that Irian Jaya Province is not different from the other provinces because Irian Jaya belongs to all Indonesians spreading over from Sabang to Merauke. The Governor of Irian jaya, Izaac Hindom, pointed out this fact during the interview by two members of the Indonesia Membangun (Developing Indonesia) Team, sahat Nainggolan and Asmi Indra in his office room, on December 24. 1986

Izaac Hindom is a man of Irian Jaya origin lower rank. From his position as and assistant to the Resident of Fak-Fak in 1954, he was then transferred to KOKAS District to assist in the district's administration. In the same year, he become the assistant to the HPB Fak-Fak. In March 1958, he was promoted to the position of Tb HPB of Fak-Fak. After three months in this position, in July 1958, he was appointed the Bestuur (Administrative) Assistant. In February 1960, he was appointed the Chief of District of Teluk Aguni (Kaimana). In September 1962, he became the Tb Resident of Fak-Fak, then in June 1963, he held the position of KPS of Teminabuan.

Two years after the transfer of administration of Irian Jaya to the Republic of Indonesia, in July 1965, Izaac Hindom was appointed the Member of BPH of Irian Jaya having its office in Jakarta. In October 1971, he was resigned with honour from his membership of BPH, to be then appointed the Member of the DPR RI (Parliament) and at the same time the Member of the MPA (Supreme Deliberative Assembly) on the basis of the SK Presiden RI (Decres of the President) No 103/M of 1977 dated September 10, 1977. On November 22, 1980, Izaac Hindom was appointed the Executive Vice-Governor of Irian Jaya Province. Then, on August 4, 1982, he was appointed the Executive of Governernor's Duties. On the basis of the SK Presiden RI No 194/M of 1982, on November 12, 1982, he was appointed the Governor of Irian Jaya Province. Having such a long experience in public administration and education being his background, Hindom was now making a stop-by-step effort to manage the development in Irian Jaya in order to take off from the past time toward the future.

To every guest visiting Irian Jaya who asks about the development in this area, Governor Izaac Hindom always maintains that we all living in the Republic of Indonesia are just like the members of a big family who have our dining tables. He supposes that there are 27 dining tables in the big family. The head of the family has already chosen the menus for today, tomorrow, or for the next one week, of those for breakfast this morning, for lunch and for dinner. Thus, the President of the Republic of Indonesia would not consider it necessary to come to each dining table in order to give the guidance. It is true of the development being implemented in Indonesia, said the Governor who in 1955 was the Chief of Teluk Etna District. All of the policies are the products of the MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia = The People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia) and are the decisions of all people of Indonesia. The governor along with his apparatus both in the governor's office and in the rural areas' subsidiaries are the hands of the President being the Mandatory of the MPR in implementing the programme outlined by the decrees of the MPR.

Accordingly, being the Governor he is obliged to endeavour to make Irian Jaya capable to fulfil just what the communities require, that is, fulfilling the basic needs in order to improve the living standard. Therefore, every programme being implemented in Irian Jaya has been the urgent one. He studies every programme of development carefully before he decides to implement one which he considers to be urgently needed. His decision are based upon the problems which he is being faced with.

"Of importance is how to make the nature of Irian Jaya become reliable sources of wealth and not reversely become the sources of poverty. Just how to make the natural resources capable to give beneficial functions to the surrounding communities," explained the Governor who in 1957 held the position as Tb HPB of Kaimana. "It is in this case that the Governor could not but refer to the products of the MPR and the GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara = The State Policy Guidelines)." "For instance", Hindom continued. "It has been implied in the GBHN that the transmigration programme is the form of the Government's effort to equitably distribute the

tahun 1957. Dalam hal itulah Gubernur tidak bisa lain harus berpegang kepada Produk MPR dan GBHN. Misalnya menurut Hindom, dalam GBHN telah digariskan bahwa transmigrasi adalah merupakan upaya pemerintah untuk penyebaran penduduk secara merata. Itu semua tidak lain adalah supaya mengefektifkan usaha semaksimal mungkin penggunaan setiap jengkal tanah air yang kita citai ini, bisa digarap sebaik mungkin sehingga memberikan sumbangan kepada perbaikan taraf hidup masyarakat di daerah ini. Dasar pemikiran tentang transmigrasi di Indonesia sangat mengena dan cocok. Untuk itulah Pemerintah Daerah Propinsi Irian Jaya sangat menyambut baik program ini. Karena melalui program transmigrasi, Irian Jaya akan berusaha menjawab segala tantangan-tatangan dan hambatan-hambatan yang sedang dihadapi daerah ini.

"Melalui Program Transmigrasi Irian Jaya yang masyarakatnya masih terisolir dapat terbuka dan dapat mengadakan komunikasi dengan saudara-saudaranya dari Propinsi lain di luar daerahnya, diluar tempat tinggalnya. Melalui transmigrasi, kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi penghambat dapat ditekan, dikurangi atau dihapuskan sama sekali. Karena dengan adanya komunikasi antar Warga Negara Indonesia yang lebih maju maka masyarakat Irian Jaya yang relatif masih terbelakang akan dapat mengembangkan diri", katanya.

Masalah sosial juga merupakan masalah yang sangat mendesak di Irian Jaya. Sebab, bagaimanapun masalah sosial budaya di daerah-daerah ini sangat saling terkait. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kehidupan masyarakat seperti di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan peranan kunci bagi kemakmuran dalam mengolah semua potensi yang ada di Irian Jaya. Ternyata menurut Gubernur, Irian Jaya dalam penyebaran pendidikan masih tetap mengalami kesulitan. Irian Jaya dengan penyebaran penduduk dalam kelompok-kelompok kecil jauh di pedalaman yang luasnya 3½ kali Pulau Jawa, merupakan hambatan yang besar untuk membuka satu sekolah SD bagi penduduk satu kampung yang hanya 60 orang adalah tidak mungkin. Dan di daerah ini masih banyak desa seperti itu. "Mengatasi hal itu adalah melalui Program Transmigrasi. Melalui daerah transmigrasi, mereka kita tempatkan di lokasi transmigrasi. Pada akhirnya kampung yang terisolir itu dapat tercover dalam proyek transmigrasi", katanya. Untuk itulah Pemerintah mempersiapkan daerah transmigrasi yang ditujukan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti pendidikan, transportasi, produksi untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

Pembangunan Irian Jaya bagi Izaac Hindom merupakan dorongan suatu falsafah sebagai yang dipercaya oleh Pemerintah Pusat dan rakyat. Ia berkata : "Saya mau meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang satu setengah juta jiwa di daerah Irian Jaya. Saya senantiasa ingin memikirkan dan melakukan apa saja agar daerah ini suatu saat dapat setaraf dan hidup berdampingan dengan saudara-saudaranya yang 163,5 juta rakyat Indonesia lainnya di seluruh tanah air. Saya akhirnya ingin menjawab setiap tantangan yang dihadapi oleh penduduk yang 1,6 juta di daerah Irian Jaya ini, dalam rangka keindonesiaannya".

1. Pembangunan Masih Bersifat Pengenalan

Kalau menyebut pembangunan masih bersifat pengenalan di Irian Jaya padahal kita sudah berada dalam Pelita IV dan sedang menuju tinggal landas agak seperti riskan sekali. Tetapi kenyataannya itu memang masih relevan. Ketua BAPPEDA Propinsi Irian Jaya **Drs Jacob Patippi** dalam kesempatan wawancara dengan Tim Indonesia Membangun, di Jayapura akhir bulan Desember 1986, mengatakan pembangunan Irian Jaya harus dilihat dari berbagai faktor. Dan aspek sejarah merupakan faktor yang banyak disebutnya sebagai mempengaruhi lambatnya pembangunan Irian Jaya.

Indonesia memang merdeka dan berdaulat tahun 1945, namun Irian Jaya masih lama berada dalam genggaman kolonial Belanda. Lebih jauh ke belakang zaman pra kemerdekaan. Zaman pra kemerdekaan P Jawa maupun Sumatera sudah mulai disentuh pengaruh budaya yang relatif maju termasuk pengaruh kebudayaan asing, Hindu, Eropa dan Islam.

Kemajuan dan pembangunan di luar Irian Jaya bisa dikatakan sudah mulai sejak lama. Sejak 1600 tahun sebelum proklamasi Jawa maupun Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah digerakkan oleh sistem penjajahan.

"Irian Jaya bagaimana? Kalau kita berbicara tentang Belanda yang menjajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke selama 350 tahun, saya berani mengatakan waktu itu masih dalam pembangunan administratif namun pembangunan fisik belum ada. Irian pada waktu itu masih daerah patroli dari Keresidenan Maluku. Belanda mengirim tentaranya melihat ke Irian Jaya semata-mata supaya jangan sampai dimasuki orang Inggeris maupun Jerman", kata Jacob.

Sebetulnya baru setelah proklamasi, Ilrian Jaya ini dijaman Belanda. Pertama dengan adanya Zending. Zending masuk di Irian Jaya tahun

population to the whole areas in Indonesia. This is nothing but to make effective the utmost effort to utilise every hand-span of area our beloved fatherland. The idea on transmigration is very correct and suitable to Indonesia. For this reason the Regional Government of Irian Jaya welcome the programme, because through the transmigration programme Irian Jaya will try to face all challenges and barriers existing in this area".

"Through the transmigration programme the communities of Irian Jaya who are still isolated may be able to get in touch with their brothers and sisters from other province outside their area, outside their living environment. Through this programme, the difficulties which have become the barriers so far may be depressed, minimised or be eliminated. The reason is that by the communication with other Indonesian citizens who are of more advanced societies, the communities of Irian Jaya who are still relatively backward will be able to develop themselves".

The social problems in Irian Jaya are regarded as pressing. The reason for it is that the socio-cultural problems in this area are nevertheless inter-related. Therefore, the effort to improve the education in this area is considered important in order to improve the social life. Education is the key to welfare. In this case, education may help the people of Irian Jaya in exploiting the potentials existing in their area. In fact, according to the Governor, the distribution of education in Irian Jaya is still faced with diffulties. Irian Jaya having its people living spreadingly in small groups in very remote place over the whole area which is 3¼ times larger than the Isle of Java, still finds the difficulty to found just one primary school in a small place inhibited by only 60 people. It is impossible found a primary school only to meet the need of such a small number of people, and there are lots of such places in Irian Jaya. "To cope with this problem, the transmigration programme is the way-out. We put those people in the transmigration settlement areas. In the long run, those isolated people will be covered by the transmigration project," the Governor added. For this reason, the Government has prepared the transmigration areas which may function to meet various needs such as education, transportation and producation in order to improve the social economy.

To Izaac Hindom, developing Irian Jaya is practising a philosophy. This philosophy means the motivation to develop the area for both the Central Government and the people have relied on him the success of the provincial development of Irian Jaya. Then he confirmed: "I wish to improve the living standard of these one and a half million Indonesian people in Irian Jaya. I keep wanting to thing of the efforts and to do anything for this area so that someday this area may be equal to the other areas, and the people may live side by side with their 163,5 million brothers and sisters of Indonesia. Finally, I would like to respond to any challenge which is being faced by these 1,6 million people of Irian Jaya, in order to constitute their being Indonesians."

1. The Development to Irian Jaya : Still an Introduction

Saying that our development programme is still an introduction to Irian Jaya while we are now implementing the Pelita IV and are about to take off from the development era will be a little too risky. In fact, the above saying is indeed still relevant. The Head of The BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah = The Regional Development Planning Board) of Irian Jaya, Drs Jacob Patippi, during the interview by the Indonesia Membangun Team in Jayapura in the last of December 1986, had pointed out that the development in Irian Jaya should be seen by considering several factors. Among the others, the historic factor according to him is that which to some extent has caused the development in this area to run slowly.

Indonesian obtained her independence and sovereignty in1945, but since then Irian Jaya had still been under the Dutch Colonial Government. Back farther to the prae-independence era, both Java and Sumatra islands had been in touch with the cultural influence of foreign countries which were relatively more advanced, such as that of Hinduistic, Islamic and European cultures.

It can be said that the advance and development in areas outside Irian Jaya had been initiated since a long time ago. Since 1600 years before the proclamation of this country, the areas of Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi had been developed by means of the colonial system.

"What about Irian Jaya? Talking about the Dutch who colonised the Indonesian archipelago spreading from Sabang to Merauke for 350 years, I dare to say that the Dutch in those times had only implemented the administrative development instead of the physical one. Irian Jaya at those same times was still under hit military supervision of Maluku Residency. The Dutch sent their military patrol to Irian Jaya merely to protect the area from being invaded by the Britishers or the Germans", Jacob explained.

Actually, the Dutch had begun to occupy Irian Jaya after the proclamation. Firstly, by the Christian Missions. The first Christian Mission entering entering this area was in 1820 through Manokwari. Since then, Irian Jaya had been open to outside influence Later, the Missions spread their missionary activities to the north-eastern part of the area, and farther to the south. So it is true to say that tye Dutch had only begun to pay attention

1820 di Manokwari. Jadi baru saat itulah Irian Jaya mulai membuka matanya. Setelah itu baru Jetmani dan Keslere, ini di bagian Barat. Kemudian berkembang ke daerah Timur bagian Utara kemudian ke Selatan. Bisa dikatakan Belanda baru memperhatikan Irian Jaya setelah proklamasi kemerdekaan RI. Itupun seratus persen bermotif politik, hanya sebagai pelarian dan benteng terakhir kekuasannya di wilayah Nusantara.

"Oleh karena itu menurut dia pembangunan Irian Jaya tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Pada masa itupun bisa dikatakan hanya Zendinglah yang paling banyak berperan dalam pembangunan. Terutama di bidang rohani, kemudian baru membangun di bidang pendidikan. Sekolah yang tertinggi pada waktu itu adalah Sekolah Guru di Wasio Kabupaten Manokwari", katanya.

"Ketika Pelita pertama dimulai tahun 1969, daerah lain di luar Irian Jaya telah memiliki beberapa fasilitas penting. Bagi Irian Jaya tahun 1969 itu bisa dikatakan mulai dari Nol" kata Jacob. Hal ini menurut dia membawa suatu efek sosial, politis kepada masyarakat di sini yang sudah tidak sabar dan mereka beranggapan pembangunan yang dimulai sama yaitu tahun 1969 itu saudara-saudara kita di sana, katakanlah misalnya disana di daerah lain telah mencapai 85% tetapi di Irian Jaya baru mencapai 45%, sehingga mereka menganggap pemerintah kurang memperhatikan Irian Jaya. Anggaran ini berkembang di tengah masyarakat, padahal masyarakat tidak mengetahui bahwa saudaranya pada tahun 1950 telah mulai membangun sedangkan di Irian Jaya baru dimulai tahun 1969. Hal beginilah sebenarnya yang membuat kecemburuan sosial masyarakat disini menurut Jacob Patippi.

"Itu sering saya nyatakan di dalam forum-forum resmi, seperti didalam Raker dan sebagainya", tegasnya.

Irian Jaya lama belum punya suatu pedoman yang mapan. Hal itu terlihat setiap ganti Gubernur baru mulai melaksanakan programnya sendiri dan Gubernur yang lain datang ia tidak melanjutkan program yang lalu, tetapi ia mulai lagi dari yang lain dan begitulah seterusnya. Seolah-olah pembangunan tidak terencana dan tidak kontinyu.

Dulu waktu Rio Sampurna menjadi Gubernur, Gubernur hanya melaksanakan amanat Presiden Soekarno bahwa setelah Irian Jaya kembali ke Republik Gubernurnya orang Irian Jaya. Ini direalisir, Bunai diangkat menjadi Gubernur. Ia itu 100% politis jadi tidak berbicara soal pembangunan, ia menjadi Gubernur hanya setahun lebih.

Kemudian Kasiepo jadi Gubernur selama 8 tahun, dia mempunyai tugas memenangkan Pepera. Ia harus ke seluruh daerah Irian Jaya, ia menunjukkan bahwa Gubernur adalah orang Irian Jaya supaya orang Irian senang dan agar nanti dalam Pepera mereka menunjuk Republik.

Setelah itu yang menjadi Gubernur Apuk, dia mulai dengan pembangunan "fisik", ia mencari jalan pintas mulai dari dasar. Untuk itu pembangunan dilakukan di kota-kota, membuat keindahan, ketertiban, taman-taman dan sebagainya, kemudian Operasi Koteka, Operasi Koteka secara fisik yaitu buka Koteka dikasih baju, tanpa mendidik masyarakat bagaimana supaya membangkitkan motivasi mereka. Tegasnya pembangunan tidak mendasar hingga tidak bisa lestari.

Lalu Suteran jadi Gubernur tahun 1975. Menurut Jacob baru sejak periode Suteran Irian Jaya punya konsep dalam membangun daerah. Dan suteran memang berpikir, orang Irian agar dapat maju, bila mereka itu dibangun dengan cara mereka. Dibuatkan perkebunan, apa saja di suruh tanam, tidak perduli apakah itu cengkeh, kelapa ataupun aren. Tidak usah menunggu sistem perkebunan, tapi gunakan cara kalian bercocok tanam.

Sarana sosiologis cara seperti itu memang tidak tepat. Tetapi itu memang pengaruhnya ada, sebab setelah dengan cara mereka itu mencapai kemajuan, baru diberi motivasi-motivasi, kalau mau pertaniannya berhasil baik maka harus tanam lebih teratur lagi. Lima tahun Suteran menjadi Gubernur. Tahun 1980 Busiri jadi Gubernur.

"Dan ternyata ia juga masih meneruskan program Gubernur sebelumnya dan mulailah terasa ada kontinuitas dalam pembangunan Irian Jaya", kata Jacob.

Bahkan pada masa Busirilah Perkebunan Inti Rakyat (PIR) mulai diperkenalkan. Dan melalui PIR-lah Busiri mengatasi masalah ladang berpindah dan menyatukan kelompok-kelompok kecil masyarakat desa di Irian Jaya. Kelapa sawit, cengkeh, tebu, karet, kelapa hibrida mulai dikenal petani di sekitar Jayapura. Kemudian pembangunan perikanan dirintis di Sorong, dan di Biak. Di Merauke dirintis PIR tebu dan karet.

Akhirnya Busiri almarhum diganti Hindom. Hindom meneruskan pola PIR ini. Tetapi Izaac Hindom melihat agar pola PIR lebih cepat berhasil perlu didukung dengan pola transmigrasi. Transmigrasi sebagai tenaga inti dan putra daerah akan menjadi tenaga pendamping dalam mensukseskan program PIR. Jadi kedua-duanya merupakan plasma dalam menunjang tenaga PIR.

"Saat itulah Irian Jaya sudah mulai mapan. Pembangunan yang terencana sekarang sudah mulai memperoleh bentuknya. Kondisi seperti ini yang perlu kita ciptakan sehingga setiap ganti Gubernur bisa meneruskan apa yang dilakukan Gubernur sebelumnya."

to Irian Jaya after the Proclamation of the Republic of Indonesia. Their occupation of Irian Jaya was merely due to the political motivation, that was to compensate for their loss in the war besides to make the island their last territory in this archipelago.

"That is why the Dutch thought that the development in Irian Jaya should be implemented by using the different pattern from that used for other areas. At those times it is only the Christian missions which played the greatest role in development, especially the spritual development, which was later followed with the education development. The highest level of education at those times was the Teachers' Training School in Wasio in Manokwari District," Jacob described.

Jacob went on to say: "Ever since the Firts Pelita implementation in 1969, the other areas outside Irian Jaya already had several important facilities. Whereas to Irian Jaya the year of 1969 was the time to start from nothing." According to Jacob, the above-mentioned fact had given both the social and political effects to the societies in that area. An example for this is, when the achievement of development in other areas is 85 % while that in Irian Jaya is 45 %, the people of Irian Jaya may think that the Government has paid less attention to them, and this thought will then grow up among the societies. These societies just do not realise that their brothers and sisters in the other areas have been developing since 1950 while they have only started to develop since 1969. Jacob continued to say that the tough as he had pointed out before had become the cause of social jealousy that rose among the Irian Jaya societies.

"I have often stated this in official forums, such as in workshops and the like," Jacob Patippi confirmed.

For a long time, Irian Jaya had not been provided with an established guideline for development. A clear example for this is that, every new governor will certainly implement his new programmes, and the next governor will also discontinue the former programmes. This situation goes on from time to time, as if the development in Irian Jaya were not well-planned and were discontinuous.

Some years ago, when Rio Sampurna was the Governor of the area, the Governor was only executing the Mandate of Presiden Soekarno, who decided to appoint and indigenous Irianese the Governor of the area right after the handing over of Irian Jaya to the Republic of Indonesia. His decision had been materialised by appointing Bunai the Governor of Irian Jaya. In fact, Bunai was one-hundred percent a politician so he did not give any touch on development, until he resigned a year later. Then Kasepo was appointed the Governor. He was assigned to win the Pepera (Pemilihan Pendapat Rakyat = The Act of Free Choice) to be held at that time. He had to tour around the whole area, in order to show that the Governor was an indigenous Irianese, so that all of the Iranese people might be happy with that and would choose the Republic during the next Papera.

The later governor was Apuk, who started with the physical development. He made an access to achieve the development. The development programme was initiated in the cities by beautifying them, putting the urban activities in order, building the parks and the like. Then he launched the Koteka Operation, which was completely a physycal operation by which the indigenous Irianese still using the koteka (the traditional wear for men) were asked to put off the koteka and to were dresses. They were not given the opportunity to get some education by which they migh have their motivations. In short, the development during this administration was not concerned with the basic importance and consequently the programme could not las forever.

In 1975, Sutran was appointed the governor. According to Jacob, it was since this period of Suteran that Irian Jaya had owned the concept of regional development. Sutran though that in order to develop Irian Jaya, the provincial government should let the people their area by their own ways. They were provided with the plantation estates in which they may plant any kind of plantation like clove, coconut or palm. They may start it without having to wait for any sistem of plantation. Instead, they may stard to cultivated the land by their own methods.

Such a sociological method was indeed not correct. However, it had its effect on the development because when they succeeded by they method, they would be provided with some motivations. In other words, if they would like to have their plantations a success, they would have to cultivate their land by using more regular patterns. Sutran held the position for five years. In 1980, Busiri came to replace him.

"He still continued the programmes established by the former governor, and since then the development programmes in Irian Jaya had been felt constant and continuous," Jacob told the interviewers.

"Even during the administration of Busiri the PIR (Perkebunan Inti Rakyat = The People's Nucleas Plantation) had been introduced. By means of the PIR Busiri had overcome the problem of nomadic cultivation pattern and had managed to put the separate small groups of people in one communal area. The farmers around Jayapura had then begun to recognise the plants like palm, clove, sugar-cane, hybrid coconut and rubber. Later on

Irian Jaya tahun 1969 mulai dari nol pada hal Pelita VI Indonesia harus tinggal landas dan ini merupakan tujuan nasional. Bagaimanapun juga Irian Jaya harus pula ada dalam siklus ini sungguhpun ia berada di urutan yang terakhir tapi ia harus berada di dalamnya.

Untuk mencapai maksud tersebut Pemerintah Daerah mempunyai Tim Konsultan. Tim Konsultan mendapatkan kotnrak 3 tahun, sedangkan tugas mereka adalah membuat suatu kerangka rencana keluar bagaimana caranya membangun Irian Jaya. Karena selama ini pembangunan Irian Jaya belum dapat dilihat secara integral. Pembangunan pendidikan, prasarana, kesehatan yang secara terpadu belum jelas nampak sebagai suatu mekanisme yang bisa diterapkan untuk mempercepat pembangunan. Dalam hal demikian Tim Konsultan tersebut diharapkan dapat berperanan. Mereka akan memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya perencanaan pembangunan disusun.

Jumlah penduduk Irian yang sedikit tapi dengan wilayah yang terluas di Indonesia merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan. Apakah hanya dengan 1 (satu) juta orang bisa membangun suatu daerah yang luas ?

Benua Australia dibangun tidak seluruh wilayahnya tapi hanya daerah-daerah yang subur. Apakah Irian Jaya perlu seperti itu? Tentu tidak !

Orang Irian menurut Ketua BAPPEDA-nya cukup dibuat tersebar di pulau yang besar ini dengan mendiami daerah-daerah subur tertentu sehingga daerah tersebut dapat berkembang. Irian Jaya dibagi dalam beberapa Blok, misalnya daerah Merauke tidak seluruhnya perlu dibangun tetapi cukup dicari daerah-daerah yang subur yang fasilitasnya dibagi menurut kondisi daerah masing-masing. Dan kesanalah kita harapkan orang bisa digiring untuk bisa membangun dengan sistem wilayah pembangunan. Kemudian di wilayah utara Jayapura dikembangkan dan berikutnya daerah Banyai sampai daerah Waropen, Manokwari, terus daerah Sorong, Bentumi, Fak-Fak dan sebagainya.

Semua ini merupakan daerah yang potensial dan saat ini sudah mulai berkembang.

Dengan jalan inilah Irian Jaya menjawab tantangan bagaimana dapat membangun masyarakat untuk mengejar keterbelakangan dan dapat ikut dalam tahap tinggal landas nanti.

"Mulai sekarang tim survey dengan konsultan asing sedang berusaha bagaimana membentuk orang di daerah-daerah Irian Jaya bisa dibangun sesuai dengan kondisi medan maupun kondisi masyarakat itu sendiri. Juga pendekatan budaya dilakukan terhadap masyarakat asli. Kemudian objek-objek apa dilakukan di sana sebagai realisasi dari pembangunan. Apakah di dalam bidang pertanian, perkebunan, jenis pertanian pangan atau perkebunan, perhubungan sistem apa yang harus dikembangkan dan sebagainya".

Jadi sebetulnya persoalannya lekat disini ialah perencanaan pembangunan di Irian Jaya secara sistematis haruslah sesuai dengan kondisi masyarakat dan medannya. Misalnya kita mengganggap bahwa masyarakat Irian Jaya itu perlu pendidikan, maka dibangun sekolah mulai dari kota sampai ke kampung-kampung. Ditengah hutan pun kita bisa lihat dari pesawat bahwa dimana-mana ada pembangunan gedung SD dengan atap sengnya. Tetapi setelah kita datang ke sana apakah sekolah tersebut tetap berfungsi ? Kalau ada berapa orangkah muridnya, berapa orangkah gurunya. Sebab kapasitas gedung 6 kelas, ada rumah guru, dan ada rumah penjaga sekolah tapi gurunya ternyata hanya satu orang dan muridnya hanya 10 orang. Ini seakan-akan menunjukkan suatu pemborosan keuangan negara, tidak ada efisiensi apalagi efektifitas. Ini juga menjadi celaan terhadap Pemerintah, masyarakat menganggap Pemda membangun tidak punya rencana atau membangun dengan rencana yang tidak matang.

Tapi dipihak lain Jacob menyebut itu bisa diambil hikmah. Sebab Pemda perlu memperkenalkan pembangunan kepada masyarakat. Masyarakat harus mengetahui bahwa gema pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa dan negara itu sudah sampai ke kuping, mata dan hati mereka. Mereka perlu mengalami bahwa pembangunan itu telah sampai ke kampung, pelosok tempat tinggal mereka. Soal dia memanfaatkan atau tidak, berfungsi atau tidak itu urusan belakangan.

Yang penting sasarannya tercapai. Nanti dari rakyat kita harapkan kesadaran secara perlahan-lahan untuk mendidik anak-anaknya. Bukan sekolah yang mencari anak tapi sebaliknya. Tapi saat ini di Irian Java memang harus sekolah yang mencari murid. Ini kondisi nyata daerah ini juga. Itulah sebabnya sampai sekarang pembangunan bagi Irian Java masih bersifat pengenalan. Mmasyarakat masih perlu disadarkan tentang apa itu pembangunan? Apa manfaat dari pembangunan bagi masyarakat? Pada gilirannya nanti apabila pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan yang matang, masyarakat itu sudah siap.

the development of fisth farming was pioneered in sorong and Biak. The PIR of sugar-cane and rubber was then pioneered in Merauke," Jacob specified.

Busiri passed away, and Hindom was appointed the Governor of the area. He continued the PIR Program. Moreover, Hindom thinks that in order to make it an immediate success it should be supported with the transmigration programme. The transmigrants area supposed to be the main power while the indigenous inhabitants to be the coorporating power in succeeding this PIR Programme. So, both are regarded the plasma of the PIR.

"It is since this era that Irian Jawa has put itself in a firm position. The development which is now well-planned has found its pattern. It is such condition that we should create so that each new govenor may continue what has been done by the former," Jacob confirmed.

Irian Jaya started the development programme in 1969 from nothing, while in fact Indonesia will have to take off from the development era by the completion of the next Pelita VI which is the national target. It means that Irian Jaya should unavoidably belong to this course of time for completing its development although Irian Jaya has been has been the last rank in the structure of development achievement.

In order to be able to complete the development in due time, the Provincial Administration has established a Consulting Team. The team works on contract basis for three years, while the main duty is to outline the plan of development in Irian Jaya, because so far the development programme has not been an integrated one. The developments in education, healt and in infra-structures have not been implemented by using an integrated pattern, which may form a mechanism for accelerating the development. In this case, the team is expected to play an important role. The members of the team will provide the inputs concerning with how to plan the development properly.

Irian Jaya having the smallest number of population but the largest area in Indonesia is faced with one main problem in implementing the development. The problem is, is it possible for Irian Jaya having only 1 (one) million people to develop such a large area?

The Head of BAPPEDA of Irian Jaya believes that simply by distributing the people to some fertile areas, those areas will be developed.

Australia does not develop the whole parts of the continent but the fertile areas only. Should Irian Jaya do the same thing? Of course not!

Irian Jaya is divided into several blocks. For instance, the District of Merauke. It is not necessary to develop all parts of the district but certain parts only which have been regarded fertile and which facilities are to be provided by the conditions of these parts. It is in this way that we are directing the people in implementing the development. In the north, Jayapura is to be developed, then Banyai and farther to Maropen, Manokwari, and still farther to Sorong, Sentani, Fak-Fak and so on. All of them are the potential areas to be developed, and which are now being developed.

By this way Irian Jaya has been trying to respond to any challenge in order to keep in pace with the National Development so that Irian Jaya may also be able to take off later in due time.

"Ever since this time, a team of survey consisting of the foreign consultants has been surveying on how to motivate the people in order to develop Irian Jaya in accordance with the conditions of the living areas (environment) and thos of the communities themselves. Besides, the cultural approach has now been made to the indigenous inhabitants. Then, we will turn to the objects which are worth for realisation in the framework of development. These objects area among others the agriculture, plantation, and food-stuff farming. The next step will be what system of communication is to be developed, and so on," said Jacob about the present effort to develop his area.

Thus, it seems that the crucial problem in the development in Irian Jaya is that there should be a systematic programme which meets the conditions of the environment and those of te communities. Suppose we think that the Irianese need education, we will then build some school buildings in some places from the urban to the rural areas. Even when we are aboard the airplane, we can see some elementary school buildings with their corrugated-zinc roof, everywhere among the forests below. When later we visit those schools we will surely ask these questions whether those schools are already in function, and if so then how many are the teachers and the pupils. It is because there is one elementary school which has 6 classrooms, the teacher housing and the school-keeper housing, but is found to have only one teacher and 10 pupils. It seems to be wasting the Government's money, inefficient and moreover it seems to be ineffective. This fact may also become a refutation to the Government. The people may think that this development is not well-planned, or that the plan of development is not carefully prepared.

On the other hand, Jacob mentioned that we may take the benefit from such a failure. By this he means that the Provincial Government should necessarily introduce the development programme to the communities. The communities should be aware that the echo of development being implemented by the country and the and the nation has now reached their ears. They should be aware that the development has covered the rural areas where they all

2. Desa Terpadu Merupakan Suatu Idaman

Desa terpadu ialah desa yang dipugar dimana masyarakatnya tidak dipindahkan, tetapi rumahnya dibuat serta ditata dengan baik seperti kepunyaan para transmigrasi kemudian mereka itu diberi fasilitas umum, seperti sekolah, poliklinik, lapangan olahraga, sumur dan WC. Dengan demikian mereka diharapkan dapat berintegrasi dan belajar hidup teratur.

"Kami disini berupaya membuat suatu penelitian komoditi apa yang bisa dikenalkan/dikembangkan oleh masyarakat agar dengan demikian mereka akan berkembang", kata Jacob. Selanjutnya dikatakan sedang dipikirkan alternatif mengembangkan anggur, bawang putih, kopi dan apel. Budidaya tersebut memang dapat tumbuh disini dan potensial untuk memberi penghasilan tinggi bagi masyarakat daerah pedalaman. Sebab di sini ada 600.000 penduduk yang memerlukan penataan struktur masyarakatnya ke suatu daerah cukup banyak tantangannya. Ada beberapa Kecamatan di sini cukup berat untuk dijangkau, apalagi memindahkan mereka. Dengan dana yang terbatas tak memungkinkan. Diharapkan mereka dengan sendirinya pindah ke daerah pinggir jalan dan cukup diberi bantuan penyuluhan dari pemerintah.

Dengan membuat sistem pertanian di suatu tempat yang subur diharapkan penduduk pedalaman mau datang sendiri. Jadi semacam daya pikat untuk mengumpulkan mereka pada satu wilayah pemukiman. Dalam hal ini peranan pihak swasta terutama misi gereja dengan fasilitas dan cara mereka membangun masyarakat pedalaman dimulai dari segi keagamaan sangat membantu pemerintah.

"Kalau lampu/pelita menyala atau memancar di desa-desa pedalaman itu berarti misi gereja telah masuk ke sana. Kalau kita terbang ke Birok atau Sibir lalu kita potong ke Jayawijaya dan Wamiinena, ada rumah, kampung, lembah-lembah yang dalam dengan penghuni yang mungkin dihuni 10 s/d 50 KK. Mengangkut mereka keluar dari situ, apakah satu cara yang efisisen dan etis? Dilema ini juga menjadi pemikiran bagi Pemerintah Daerah. Tak lain hanya motivasi yang saat ini banyak diberikan.

"Kita tidak bisa begitu saja kirim Hercules dua buah ke Wamena untuk memindahkan mereka ke tempat-tempat tertentu tapi kita lebih dulu mengembangkan suatu tempat sementera mereka diajak untuk mau pindah melalui suatu proses yang lama.

"Kami sekarang ini membuat ibukota kecamatan sebagai ujung tombak pembangunan Irian Jaya yang luasnya empat kali pulau Jawa dengan penduduk sekitar satu setengah juta. Sehingga diperkirakan untuk tiap 1 Km ada 2 orang, dengan penduduk yang terpencar ini kita bagi Irian Jaya menjadi 117 kecamatan, 902 kelurahan. Jadi dengan penduduk/manusia yang berpencar dan luas wilayah dengan penduduk tak seimbang ditambah lagi dengan kurangnya alat komunikasi dan perhubungan antara kota Kabupaten dengan kecamatan, kecamatan dengan desa, membuat kita berpikir bukan jangkauan pemerintah dari Kabupaten ke desa yang diutamakan tapi dari kecamatan ke desa.

"Karena aparat pemerintahan yang resmi itu sampai ke kecamatan. Desa adalah lembaga adat. Dan kecamatan secara struktural merupakan pusat pemerintah yang terakhir dan ujung tombak pemerintahan dalam pembangunan. Oleh karena itu kecamatan harus dilengkapi dengan seluruh aparat pemerintahan. Mulai tahun 1985/1986 ibukota kecamatan dan Camatnya harus ada ditempat para aparatnya. Mulai dari Camat, Sekretarisnya, Kepala Bagian harus dilengkapi dan keluarganya juga harus ada disana. Maka dengan demikian Kantor Camat, rumah camat, rumah pegawainaya disediakan. Semua dinas-dinas di kecamatan juga dilengkapi seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Peternakan, Perkebunan dan bidang-bidang yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat seperti Pendidikan dan Kebudayaan dengan SMP. SD paling tidak harus ada di kecamatan dengan guru yang lengkap, keamanan, ada kantor polisi, dan penerangan. Listrik diusahakan dapat masuk ke kota kecamatan. Ini semua juga supaya Camat kerasan dan juga sebagai pengaman. Dan anak-anaknya dapat bersekolah tak usah ke kota karena disini ada SMP. Dalam bidang kesehatan ataupun apa saja akan dilatih dan dididik di kecamatan sebagai Pusat Latihan. Masyarakat itu setelah dilatih pulang ke desanya untuk melatih yang lain. Kita mengharapkan bahwa kecamatan sebagai pusat penggandaan sedemikian rupa sehingga semua instansi dapat memberikan setiap desa dan setiap desa minimal ada 100 orang penduduk.

Misalnya seorang Kepala Pertanian Kecamatan harus membina 2000 orang petani dan diharapkan bisa kerja dalam satu formasi. Tapi saat ini satu Kepala Pertanian Kecamatan baru dapat menangani 1000 petani.

live. Whether they make use of the facilities built in the framework of the development or they do not, it will be another thing. One thing is that the target of development is reached. Later, we will gradually make the people aware of the importance of education to their children. Then we may hope that the schools will no longer seek pupils. Today, it is true that in Irian Jaya the scchools have to look for the pupils. That is why the development which has been implemented up to this time in Irian Jaya may be regarded as still reaching the introductory stage. The people still have to be made aware of the importance of development and of the benefit of development. When the plan of development which is well-prepared is to be implemented, in turn the people will have been ready to participate.

2. Integration Village : An Ideal One

The integration village is a village which has been renovated. The inhabitants of this village are not moved to the others, but the houses are rehabilitated and re-built to resemble those of the transmigrants. Later on, public facilities are founded such as the school buildings, health centres, sports field, wells and toilets. By this, it is hoped that those people may integrate with the others and live and orderly life.

"We the local authorities here have been trying to observe what commodities are worth-introducing to these people and are worth-developing here, by which we will try to teach them to grow themselves," Jacob explained. He went into say that the local authorities were now considering the alternative to develop grape, garlic, coffee and apple. These kinds of plantation are suitable to the local climate and are potential to give the inhabitants the high income. This alternative is being considered for the other alternative is hard to be implemented. There are 600.000 inhabitants living within the social structure that needs re-arranging. Moving them to other areas as an alternative will be a problematic thing to do. For instance, the other sub-districs to where those people are to be moved are quite hard to reach, while the fund for this plan is limited in amount. So it is hoped that they will move by themselves to the road-side areas while the Government will give them necessary guidances.

By establishing an agricultural system in an area, the inhabitants of the isolated areas area expected to move to that area by themselves. Thus,it is just like an appeal to attract them to gather in one livig area. In this case, the role of the private especially that of the Christian Missions which have their facilities and which have started their communal development from the development in the religious aspect, have been useful in helping the Government in the Development Programme.

"When the lamp-light or the candle-light have illuminated the remote areas, it means that the Christian (Church) Missions have entered those isolated areas. If we fly to Birok or Sibir and then we take shortcuts to reach Jayawijaya and Wamena, we will find some houses in some groups of villages deep in the valleys where about 10 up to 50 families live in. Is it an efficient and ethical thing to get them out of such places? This is also a dilemma for the Local Administration. The only thing to do is providing them with lots of motivations.

"We cannot simply send two Hercules airplanes to Wamena in order to move them to certain places, instead we should firstly develop a certain place while making them willing to move by a long-time process. "We are now making the capitals of sub-districts the starting-points of the development of Irian Jaya which is four times wider than the Island having about one and a half million people. It is approximated that every 1 square kilometre is inhibited by 2 people, and this Irian Jaya having its people living in such scattered places is divided into 117 sub-districts and 902 villages. Thus, by considering its width and its sparse population, and moreover the lack of communication facilities between districts and sub-districts, and between sub-districts and villages, we then conclude that it is not the reach of the districts to the villages that should be of priority, but the reach of sub-districts to villages.

"It is because the lowest level of the official Government apparatus is the sub-district. While the village is a traditional institution, the sub-district is by structure the las centre of government which forms the starting-point of development. Therefore, the sub-district should consist of all government apparatus. Since the period of 1985/1986, the capital of sub-district and the chief of the sub-district must be in the same place as their apparatus. The chief of sub-district, his secretary and the head of section along with their families must stay in the same place in the surrounding of the office. So they area provided with houses beside the office-building Besides, each sub-district is provided with the offices which concern directly with public sevices such as the Health Office, Public Health Centre (Puskesmas), Office of Cattle Farming, Office of Plantation Farming, and the Office of Education and Culture along with an SMP (Secondary School) building. At least there must be an SD (Elementary School) in a sub-district along with the teachers, besides a police station, and as well as the electricity. This effort is made in order to make the chief of sub-district feel at home besides to secure the life of the inhabitants. Moreover, his children will not have to go to the city in order to attend the SMP. The office building ot the sub-district head will also be utilised as the training centre in which people are

3. Transmigrasi dan Masalah Perhubungan

Kalau ada yang mengatakan bahwa transmigrasi adalah untuk memindahkan kemiskinan yang sudah membengkak di Pulau Jawa, Madura dan Bali adalah tidak benar. Jawaban ini tentu sangat beralasan karena dalam kenyataannya kehidupan saudara-saudara kita yang berasal dari Pulau Jawa yang kini ditempatkan di daerah transmigrasi di Irian Jaya seperti yang dilihat sendiri di Kabupaten Jayapura (Arso, Nimbokrang dan Koya Barat dan Koya Timur) dan di Kabupaten Sorong (Aimas I dan II) sudah mempunyai tingkat penghidupan yang stabil dan harapan untuk maju sudah terbuka.

Mengamati lokasi transmigrasi sekarang ini mempunyai kesan tersendiri, suasana dan rasa kekeluargaan nampaknya sangat menonjol. Siapa yang tidak tertarik melihat bahwa sebelum masuk transmigran lokasi Arso atau Koya Barat dan Timur adalah hutan lebat yang ganas, namun setelah ditempatkan transmigrasi dan diadakan pembinaan selama 2 (dua) tahun suasananya sudah berkembang pesat karena lokasinya sudah tertata rapi, sekalipun masih belum merata.

Upaya untuk lebih berhasil sudah terbentang. Tinggal kemauan. Rumahnya sudah teratur, dan bahkan ada yang sudah memiliki kendaraan. Pekarangan sudah ditata dan ditanami dengan tanaman produktif, sehingga sangat menyegarkan. Dari golongan yang sudah berhasil ini ada kecenderungan pula untuk menambah lahan pertaniannya karena lahan yang dimiliki sudah terolah semuanya. Dan dari kelompok ini kelihatan sekali cara-cara pengaturan tanaman untuk tetap laku di pasaran. Diversifikasi tanaman sudah mulai terlihat.

Setelah diamati ada beberapa faktor yang mengantar mereka ke puncak keberhasilan yaitu karena tingkat pengetahuan dan cara bertani yang baik, pada umumnya mereka mempunyai pendidikan umum yang memadai dan kemudian modal mereka yang dibawa dari tempat asal, disamping kepandaian membaca situasi pasaran yang sedang berkembang. Mereka mengadakan diversifikasi tanaman dengan memperhitungkan faktor pemasarannya. Dalam percakapan dengan Kepala Kanwil Transmigrasi, **Eman Sutoko** di Jayapura dikatakan bahwa masalah transmigrasi Irian Jaya sudah banyak diperbincangkan dalam berbagai kesempatan atau melalui tulisan-tulisan di mass media dan lain-lain. Namun masalah transmigrasi di Irian Jaya mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mempercepat pembangunan di Propinsi Irian Jaya. Kalau bicara pembangunan kita harus melihat dari berbagai segi. Misalnya keberhasilan transmigrasi di sektor pertanian kalau tidak didukung kemajuan di bidang transportasi hasilnya akan tidak terlihat. Karena yang sangat mendesak sekarang ini adalah bagaimana memasarkan hasil produk yang dihasilkan para transmigran yang bervariasi itu.

Umumnya sekarang ini di wilayah Irian Jaya sudah berkembang seperti halnya transmigrasi di Pantai Utara. Di pantai Utara tingkat kemudahan untuk melakukan pemasaran akibat pendatang yang relatif cepat menimbulkan pasar lebih berkembang dengan pesat. Sehingga transmigrasi di pantai Utara relatif lebih cepat dalam memasarkan hasilnya bila dibandingkan dengan pantai sebelah Selatan.

Berdasarkan hal itu Eman Sutoko mengharapkan di masa mendatang ada satu jalur lintas dari kapal laut yaitu jenis kapal penumpang yang menghubungkan daerah-daerah padat penduduknya menuju Merauke, kemudian kalau bisa sampai Ternate. Ini merupakan satu arus lintas ke Sulawesi.

Titik berat dari program transmigrasi sekarang ini memang diarahkan ke bagian selatan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jalur perhubungan antara daerah Utara yang maju dengan daerah Selatan yang kurang berkembang. Satu-satunya alat transportasi hanyalah pesawat terbang untuk calon atau bakal transmigrasi yang datang.

Akibat dari ini mereka berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebagai contoh disana sekarang ini sudah banyak sapi, dan sebagainya. Daging sapi disana harganya hanya sekitar Rp2.000,00 per kg, sedangkan ikan hanya sekitar Rp100,- s/d Rp200,- per kg. Titik berat masalah transmigrasi di Irian Jaya saat ini ialah segi pemasaran karena kurangnya hubungan dengan lokasi-lokasi luar.

Hubungan sepanjang pantai di Utara maupun di Selatan dimana alur pantai itu belum tersambung semua dengan jalan-jalan ini telah berlangsung berabad-abad yang lalu. Tapi pemerintah sudah mulai mencoba menembus isolasi tersebut dengan membuat jalan yang dikerjakan oleh pihak Departemen Pekerjaan Umum guna menembus perut bumi Irian hingga menuju daerah-daerah Hailand atau daerah Lini. Kurang lebih sekarang ini telah dibuat beberapa kilo meter disepanjang perbatasan dan dari sini terus menuju ke Ware. Sehingga akan terjadi hubungan antara manusia yang ada di Hailand dengan yang di Tanah rendah. Walaupun ini masih kecil tapi kehidupan sudah mulai ada riaknya.

trained in various aspects such as the medical aspect. Those who have been trained may go back to their villages to train the others. It is hoped that the office of sub-district which such double functions may cover all villages, each of which is expected to have at the least 100 villagers.

For instance, when a head of agricultural office should promote or give guidance to 2,000 farmers, it is hoped that he and the head (chief) of the sub-district along with their staffs can work together in a formation. Today, a head of agricultural office is capable only to serve 1000 farmers.

3. Transmigration and the Communication Problems

The saying that transmigration programme is implemented in order to transfer the extrame poverties in Java, Madura and Bali, is just not true. This statement is very reasonable as in reality, our brothers and sisters from Java Island who are now living in the transmigration areas in Irian Jaya such as those whom we can seen by ourselves in Jayapura District (Arso, Nimbokrang, West Koya and East Koya) and in Sorong District (Kimas I and Kimas II), have reached the stable living standard and there is a hope that they can live a better life.

Observing the location of transmigration today gives a special impression. Brotherhood seems to be predominating. Who will not be impressed to see this fact, considering that before turning to transmigration locations (transmigration settlement areas), Arso, North and West Koya were just dense and wild forest, but now after the promoting efforts for 2 (two) years those areas have developed fast, and they are now well-arranged although the arrangement has not been made equitable.

The way to greater success has been opened. Only the will that is still needed. The houses are built in good arrangement, even there are some inhabitants who own cars. The yards of the houses are planted with productive plantations, which help freshen the environment. Those successful transmigrants like the ones described above tend to need more cultivation land for their plantation fields have been completely cultivated. Besides, it seems that they have specific ways of managing the plantation in order to always meet the demand of the market. The diversifacion of plantation seems to have been made.

By an observation, it is found that there are several factors which have led them to the success. Those factors are the level of know-how and the sound method of cultivation. In general, they have fair education background besides having enough capital money which they brough with from their original places, and as well as the ability to predict the conditions of the market. They implement the diversification of plantation by calculating the marketing factors. The Head of Subsidiary of Transmigration Department in Irian Jaya, Eman Sutoko, pointed out during an interview in his office in Jayapura that the problem of transmigration had been often discussed on various occassions or through the articles in the mass-media. However, the transmigration programme launched in Irian Jaya had a noble purpose that was to accelerate the development in the province. Talking about the development, according to Eman Sutoko should consider some factors. For example, the success of transmigration in the sector of agriculture would not have been possible if not if had not been supported with the advance in the aspect of transportation. The urgent action to be taken by now is to find the way to market the various land-produces which had been the farming production of the transmigrants.

The transmigration settlement areas in Irian Jaya have been generally developing, such as the areas in the North Coast. The market of land-produces in the North Coast has been growing fairly fast, due to the flow of the incoming transmigrants which is relatively fast so that it has facilitated the effort to market those land-produces. That is why the land-produces in the North Coast are quick to find the market than those in the South Coast.

Based on the above fact, Eman Sutoko hoped that someday the Government would establish a sea-lane by which the vessel which was supposed to transport passangers from the densely-populated areas to Merauke, and then if possible to Ternate. It would be a sea-lane to Sulawesi Island.

The transmigration programme today is more directed to the southern part. It is because there is no communication facility between the advanced northern part and the less developed southern part. The only transportation facility is air-plane supposed to be utilised by the prospective transmigrants. As a result, the settled transmigrants have been utilising the land-produces only for themselves. Just for example, today it is easy to find beef there, besides the other food-stuffs. The price of beef in this area is around Rp2.000,00 per kg, while that of fish is just around Rp100,- up to Rp200,- per kg. Thus, the main problem of transmigration in Irian Jaya today is aspect of marketing owing to the lack of communication with the areas outside Irian Jaya.

The lack of communication between both the North and the South Coasts and the outside areas due to the lack of connection between those two areas and the main roads, has been the situation ever since hundreds of years ago. However, the Government has now begun to endeavour to break this isolation by the making of roads by means of the Department of Public Works in order to penetrate the depth of Irian Jaya to get to the Highland and Lini area. Nowadays, the road which has the length of several kilometres has

Dilihat dari segi sejarah, daerah Kepala Burung mempunyai daya tarik yang cukup kuat terhadap NDP. Saya kira mempunyai daya tarik yang kuat terhadap Sulawesi Selatan dan Tenggara serta Sulawesi Utara. Merauke mempunyai daya tarik yang kuat terhadap Jawa dan Jawa Timur, Ambon dan sebagainya.

Jadi faktor-faktor ini perlu dikembangkan dimasa yang datang. Adanya jalur-jalur perhubungan untuk memudahkan daerah ini mulai dari Kepala Burung, Manokwari, Sorong dan sebagainya, kiranya juga menyambung ikatan tradisi yang sudah sejak dahulu ada dengan Nusa Tenggara Timur.

Tapi volume dari transportasi dari daerah tersebut ke lokasi transmigrasi masih relatif kecil. Contoh dari Surabaya menuju Merauke dengan kapal-kapal printis itu 19 hari. Ini ternyata kurang menarik bagi hubungan ekonomi dan sosial.

Di Irian Jaya kecepatan untuk menyiapkan lahan rumah relatif lebih cepat daripada pengisiannya, karena orang minta ke Sumatera. Dapat diketahui penyiapan lahannya dalam kuantitas relatif lebih cepat dari pendatangnya, terutama dalam tahun-tahun sekarang ini dimana dananya terbatas jadi masih terdapat rumah-rumah yang belum ditempati.

Untuk menarik transmigrasi swakarsa biasanya tergantung kepada manusianya sendiri. Demikianlah maka sejak Pelita IV disamping terus mendatangkan transmigrasi dari Jawa ke Bali, Irian Jaya berusaha memperhatikan jatah untuk penduduk setempat yang disediakan melalui Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (APPDT) yakni lebih dari 10% s/d 25%. Bahkan ada juga lokasi bisa mencapai sampai 50%. Ini dilakukan agar penduduk Irian Jaya dapat seimbang dengan penduduk pendatang. Kesenjangan sosial-ekonomi mulai dipikirkan.

Demi melihat kondisi sosial budaya daerah ini, hal itu agaknya menurut Eman merupakan suatu kewajiban sebab memang modal dasar mereka jauh berbeda dengan para pendatang. Maka dimasa-masa mendatang pihaknya meletakkan suatu tata ruang dan pola tertentu bagaimana supaya orang-orang penduduk asli tidak merasa minder (rendah diri) hidup berdampingan dengan para pendatang yang kini sudah mulai banyak di Irian Jaya. Agaknya Eman ingin ada pola khusus dari program transmigrasi di daerah ini. Misalnya mengenai masalah penyiapan lahannya dan penempatannya, perlu ada suatu penanganan di mana mereka itu perlu ditampung dulu lalu dididik kemudian digabung. Belum lagi menyinggung masalah pencampuran antara satu kelompok suku dengan kelompok suku yang lainnya dalam satu lokasi.

Dalam hal rencana campur mencampur ini perlu pula dipikirkan agar mereka cepat berasimilasi atau pembauran tanpa menimbulkan masalah. Walaupun pola ini belum begitu berhasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi secara perlahan-lahan Eman mengharapkan suatu saat ada hasilnya.

Didalam perencanaan transmigrasi di Irian Jaya ini tidak terlepas dengan pola-pola pengembangan daerah ini. Irian Jaya terdapat 9 Kabupaten, dan baru terjamah 7 Kabupaten. Jadi ada 2 Kabupaten yang belum terjamah oleh Warga transmigrasi. Karena letaknya membutuhkan jalan yang cukup panjang. Jadi keadaan ini belum ekonomis karena business oriented. Sekarang ini yang terisi hanyalah daerah-daerah pantai.

Jadi 7 Kabupaten ini kurang lebih mulai dari pra pelita sampai sekarang sekitar 24.000 KK. Rata-rata 1 (satu) tahun yang dari transmigrasi murni sekitar 3.500 s/d 4.000 KK. Dan 4.000 KK itu nantinya terus menerus dilakukan pembinaan selama 5 tahun. Jadi dengan demikian Pemerintah terus menanggung biaya pembinaan yang besar sebanyak 24.000 keluarga transmigrasi.

Untuk menyiapkan suatu program transmigrasi dengan rata-rata 4000 KK kita magang jauh-jauh hari, maka 2 tahun sebelum kita melaksanakan program tersebut telah mencari lokasi/tempat, yaitu tahun pertama minta diukur feasibility studynya, kemudian baru pengukur dan kemudian tahun ketiga penyiapan dan tahun keempat baru penempatan.

Didalam menyiapkan suatu areal Irian Jaya menemui kesulitan dalam hal mendapatkan areal yang difokuskan untuk calon warga transmigrasi. Ini berbeda dengan Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Kalau Pemerintah ingin membuka lahan harus berunding dulu dengan kepala Suku. Sebab kepala Suku merupakan penguasa bagi suatu wilayah.

been built along the border areas, from where we can then go to Ware. So, there will be a communication between the people living in the Highland and those living in the Tanah Rendah (Lowland). Although it has been just a small-scale project of communication, the life in these areas has begun to become a dynamic one.

From the historical point of view, the Kepala Burung (Bird's Head) areas has a close relation with the NDP. It has a close relation with the South Sulawesi and as well as with the North Sulawesi. Whereas Merauka is closely related with Java Island and especially with East Java, with Ambon and as well as with the others.

The above-mentioned factor is important as to be developed in the future. The communication facilities are to be established to make it easy to get in touch with the areas from the Kepala Burung, Manokwari, Sorong, to the others, besides it is hoped that those communication facilities may re-bind the traditional relation with Nusa Tenggara Timur which has been existing since a long time ago.

However, the volume of transportation from the above areas to the transmigration settlement locations is still relatively low. For instance, from Surabaya to Merauke by the pioneering vessels, it takes 19 days. Such a long time of voyage is not favourable to both economic and social communications.

In Irian Jaya, it is relatively faster to prepare the settlement area than to fill the vacant area with transmigrants only because most transmigrants prefer to be sent to Sumatera.

Especially during these years, preparing the transmigration settlement areas (locations) is by quantity relatively easier than bringing in the transmigrants themselves to those areas owing to the limited fund available for bringing them.

Thus, there are several empty houses in the settlement location which are still available.

The transmigration programme called the swakarsa (self-motivated) cannot be expected to fill those vacant houses, for this programme includes only those who become transmigrants by self-motivation.

Thus, while bringing in transmigrants continuously from Java and Bali since the beginning of the Pelita IV, Irian Jaya has kept paying attention to the settlement areas for the local in habitants which have been provided by the Programme of APPDT (Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi = The Allocation of Local Inhabitants in the Transmigration Settlement Areas). The result is, about 10 up to 25 % of the settlement areas have been occupied by the local people. Even there is one settlement area (location) which has been settled by the local people by 50 % of its capacity of settlement. This programme has been implemented in order to make the local people get along with the transmigrants. It shows that the socio-economic gap has now been considered.

By considering the socio-cultural conditions of this area, according to Eman, we may become aware of what to do in there. According to him, considering the above conditions will be an obligation because the local people's asset is so different from that of the new comers. Accordingly, in the near future he and his party will create a certain space and pattern so that the local people may not feel interior to the new comers and that they may live side by side with these new comers who are now found in larger number in Irian Jaya.

It seems that Eman intended to have a specialised programme of transmigration in this region. For instantce, in the method of preparing the settlement area and that of settling the transmigrants. In this case, he though that it was necessary to firstly accommodate them and then train them before putting them together in the same settlement.

Not to mention the ethnical problem which may arise within the settlement location.

The plan to put those of various ethnical groups together must be well-considered so that they may then assimilate immediately and mix with each others without causing any problem. Although this pattern had not yet been a success, Eman wished that someday it would give a better result.

The planning of transmigration programme in Irian Jaya has been closely related with the patterns of development in this area. Irian Jaya consists of 9 districts, 7 of which have been touched by transmigration. So, there are 2 districts that remain untouched. It is because of their distance, so that those two districts are not regarded economical especially from se two districts are not regarded economical especially from the point of view of business-oriented transmigration programme. Nowadays, it is the coastal transmigration settlement areas which have been fully utilised.

Since the prae-Pelita period, these 7 districts have accommodated more or less 24.000 families. The average number of pure transmigrants per year is about 3,500 to 4,000 families. Those 4.000 families will be given continuous guidance for the next five years. So the Government will have to provide the high cost of guidance programme for 24.000 transmigrating families (the number up to the next five years).

The transmigration programme covering the average of 4,000 families

4. Penataan Desa

Penataan desa di Propinsi Irian Jaya sebagai kegiatan yang dianggap sangat mendesak, ternyata dihadapkan pada masalah perlunya kordinasi. Demikianlah antara lain penjelasan yang diberikan Kepala Direktorat BANGDES Irian Jaya, Drs S Wanna kepada penulis. Sebab ada anggapan sementara pihak bahwa hal itu terjadi karena alasan belum adanya dasar hukumnya.

Pada hal menurut dia dalam UU No 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, kewenangan kordinasi ini dan penanganan koordinatif ini dipegang oleh Kepala Wilayah. Andai kata UU tersebut dapat dijalankan secara konsekuen tidak ada masalah dalam kordinasi. Misalnya dalam acara pertemuan antara Tim pembinaan LKMD tingkat Propinsi. Karena Gubernur sebagai Kepala Wilayah, Bupati, Camat Kepala Wilayah mempunyai wewenang dalam rapat Tim Pembina LKMD dan Instansi pelaksana teknis seharusnya dapat melaksanakan programnya sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Kepala Direktorat BANGDES sebagai Wakil Ketua Pembina LKMD dan Gubernur sebagai Ketuanya pada dasarnya dalam membina Tim Pembina LKMD tingkat Propinsi menurut Wanna adalah tempat berperan sebagai koordinator Pembangunan di pedesaan. Tapi dalam praktek, Wanna melihat pihak instansi teknis sering kali tidak memperhatikan hal tersebut. Masing-masing mereka, karena punya program dari Pusat berjalan sendiri-sendiri. Kalau terjadi sesuatu masalah bisa-bisa pihak Bangdes ikut kena getahnya.

Masyarakat desa di Irian Jaya tidak seperti halnya masyarakat desa di tempat-tempat lain sudah maju. Disini justru koordinasi perlu lebih intensif dijalankan. Di daerah lain warga masyarakat desanya sudah sadar untuk maju dan mereka malah mengembangkan diri sendiri. Penduduk pedesaan di Jawa sudah memiliki peternakan, perkebunan kopi, cengkeh. Jadi sudah ada penghasilan yang kontinyu atau bertahan lama.

Tapi di Irian Jaya penghasilan-penghasilannya yang kontinyu seperti itu belum ada, mereka selalu mencari untuk hari ini atau paling untuk jangka pendek, misalnya untuk besok. Untuk diajak berpandangan jauh ke depan mereka masih sulit. Uang bantuan sebanyak Rp1.350.000,00 per tahun yang diberikan pemerintah sebagai intensip untuk mendorong kemajuan desanya dan agar kelak dapat berdiri sendiri, malah dalam kenyataannya kadang-kadang uang ini tidak digunakan sesuai dengan rencana LKMD yang telah disetujui oleh Bupati. Sehingga akhirnya muncul anggapan LKMD tak berfungsi dan pembangunannyapun tidak nampak bukti-bukti.

"Ini bukanlah semata-mata kesalahan mereka, tapi karena mereka memang belum punya keahlian mengelola dana tersebut" tegas Wanna. Menurut dia kalau di daerah lain dalam DUP disebut 2 proyek, tapi berdasarkan kesadaran masyarakat desanya untuk gotong royong sudah tinggi maka dengan swadaya malah proyek itu bisa ditambah dengan 3 proyek lagi.

Atas dasar swakarsa sendiri daerah lain bisa membangun desanya tapi kalau di Irian Jaya hal seperti ini masih sulit. Walaupun menurut UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tapi disini apa yang disebut desa sesungguhnya tak lebih dari sebuah dusun yang berpencar-pencar. Kadang-kadang juga secara administratif kita bilang desa pada hal itu hanyalah sebuah dusun kecil. Belum lagi bicara soal tradisi. Misalnya dalam membuat tempat pemukiman. Katakanlah bagi masyarakat Sentani rumah diatas air itu menyangkut pandangan hidup mereka dimasa lampau. Sampai sekarang para sarjana-sarjana asal Sentani kalau sudah datang ke kampung mereka sudah menjadi nomor yang terakhir karena orang yang pertama adalah tokoh-tokoh adat. Mereka tidak bisa berbuat banyak melakukan perubahan atau adat dan tradisi nenek moyang yang mereka.

Masalah seperti ini bahkan sudah sering dibawa ke dalam seminar dan bahkan ke sidang-sidang DPRD. Tapi masalahnya tetap berputar di sekitar kondisi alam dan tradisi yang masih sulit dilepas.

Oleh karena itu Pemerintah berusaha melatih para kader-kader pembangunan untuk pedesaan di Irian Jaya. Diharapkan kader-kader pembangunan kelak akan banyak berperan. Mereka juga diutamakan dari anak-anak muda. Mereka diharapkan berinisiatif atau mempunyai prakarsa untuk mempelopori pembangunan desa. Bila perlu kader-kader ini disekolahkan ke Jawa dan melakukan studi perbandingan di daerah-daerah yang sudah maju pembangunan desanya.

5. Pembinaan PKK

PKK sebagaimana kita ketahui adalah organisasi yang berdiri sendiri, namun karena ada kaitannya dengan pembinaan dari Pemerin-

per year is prepared long before. Two years before the programme is implemented, the search for settlement area (location) has been started. The first year is for obtaining the result of the feasibility study, the second year for measurement, the third year for preparation, and the fourth year is for the settlement.

It is a problematic thing to find an area for transmigration settlemen in Irian Jaya. It is not so easy as in Sumatera, Sulawesi and Kalimantan. In Irian Jaya, the Governor has to previously discuss with the chief of the tribe before deciding to use a certain area, as the chief of the tribe is the authority of the local area.

4. The Arranging of Village

Arranging villages in Irian Jaya Province is the activity which is regarded as very urgent. The problem in this case has been the lack of coordination. It was explained by the Head of Directorate of BANGDES (Perkembangan Desa = Villages Development) of Irian Jaya, Drs S Wanna, to the writer. Some people think that it is because such an activity is not based on law.

In fact, according to him, the UU (Undang-Undang = Law) No 5 of 1979 on the Principles of Regional Administration provides that the authority and the execution of coordination shall be the responsibility of the Head of the Region. In case the said law is consecuently applied, there will not be any problem of coordination. For instance, during the meeting of the Guiding Team for the Provincial LKMD (Lembaga Ketananan Masyarakat Desa Rural Areas' Resilience Institution) the Governor being the Head of the Region along with the Head of District and the Head of Sub-district have the right of opinion and it had been that the concerned institution which is the technical executive should have been able to execute the programme outline by the Regional Administration. The Head of Directorate of BANGDES, as the Deputy of the Head of Guiding Team for LKMD and the Governor being the Head of the Team, according to Wanna, should become the Coordinators of the Rural Areas' Development. However, in practice the institution which is supposed to execute the programme often ignores it. Wanna saw that each institution executed its own programme which is provided by the Central Government. If a problem arises, the Directorate of BANGDES will possibly be involved.

The rural areas' inhabitants in Irian Jaya are not the same as those of the developed rural areas.In this province coordination should be implemented more intensively. The rural areas' inhabitants in the other province which have been developed, are already aware of the importance of development so that they even try to develop themselves. The rural areas' inhabitants in Java already have their cattle farms, coffee plantation and clove plantation estates. So they already have the continuous and long-lasting income. Those in Irian Java have not obtained such income, so they have to earn for today or at the most for tomorrow. It is still difficult to make them plan for the future. The financial suppoort from the Government of Rp 1.350.000,00 for a year as an intention to motivate them to help developing their villages so that someday they may live by themselves, often turns out to be misused or spent not in accordance with the plan of the LKMD which has been approved by the Head of District. Then, there will be a nation that the LKMD has not functioned well and that the rural areas development is not evident.

This is not merely their fault, but is because of their in ability of managing the fund," Wanna confirmed.

According to him, in other areas, when it was decide to propose two projects by DUP (Daftar Usulan Proyek = Form of Project Proposal), in practice there might be 3 projects being implemented due to the awareness of the villagers in those areas of cooperation besides due to their self-effort.

Thus, when the villagers in the other areas have managed to develop their villages by cooperation and self-effort, it is still difficult to expect the Irianese villagers to develop their own villages. In spites of the Law No 5 of 1979 on the Rural Areas' Administration, the so-called rural areas in Irian Jaya are not more than just scattered small village. Sometimes we call them administratively as the rural areas, but they are in fact jus small villages. Not to mention, the tradition. For instance, during the establishment of settlement location. To the local people of Sentani, houses built on the water have something to do with their way of life which is inherited by their ancestors. Even today, the academic graduates or the university graduates who are of Sentani origin, when they come home, they will be regarded the last-ranked members because the first ranked will be the traditional leaders. They do not have more to do in order to change this way of life or traditional custom.

This case has often been brought into seminars and even into the meeting of the DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = Provincial People's Consultative Council). However, it is always difficult to find the way-out for the natural condition and the strong traditional binding have always been the reasons for the failure in solving this problem.

Therefore, the Government has been striving to train the cadres of development of rural areas in Irian Jaya, who are expected to participate more actively. They consist mainly of the young people. They are expected to have the initiative to become the pioneer in the development. If it is necessary, they

tah maka garis komandonya berada di Pusat. Tapi kalau di Propinsi, Direktorat Pembangunan Desa merupakan pembina PKK. Kalau di Pusat pembinanya adalah Direktorat Jenderal Penerangan Desa. Disamping pembinaan mulai dari Pusat sampai tingkat kecamatan dibentuk pula Tim Penggerak PKK. Jadi dalam rangka pembangunan desa pembinaan PKK dalam kegiatan sehari-hari selalu bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Propinsi dalam rangka melaksanakan 10 Program PKK. Dalam pelaksanaan ini PKK membentuk kelompok-kelompok kerja. Bila Tim Penggerak PKK menghendaki salah satu aspek dari pada program pokok hendak dilaksanakan, Bangdes diharapkan dapat memberi pengarahan. Maka itu juga tugas kita membimbing, menasehatkan, memberikan pendapat dan sebagainya. Tim Penggeraklah yang menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka pelaksanaan 10 program kerjanya itu, nanti kebijaksanaan inilah yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK tingkat Propinsi, begitupun di tingkat Kabupaten dan seterusnya.

Selama ini salah satu kegiatan yang cukup intensif dilakukan di Irian Jaya ialah melatih kader-kader penggerak PKK. Terutama kader-kader tingkat Kabupaten dan yang menjadi pelatihnya Tim Penggerak tingkat Propinsi.

Dalam kegiatannya PKK mendapat bantuan baik dari pusat maupun dari Gubernur melalui APBD Tingkat I. Selain itu juga setiap tahun melalui Inpres Bantuan desa diberikan sebesar Rp250.000,- per desa untuk kepentingan PKK di masing-masing desa atau kelurahan.

Selain itu penataran tugas dari tim penggerak PKK maupun Direktorat Pembangunan Desa ialah mengadakan monitoring ke Kabupaten, lalu membina desa untuk dijadikan desa percontohan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Bagi Irian Jaya desa Sentani merupakan salah satu contoh bagi pelaksanaan PKK.

Bila suatu desa yang belum memenuhi syarat sebagai desa dibina oleh Kanwil. Transmigrasi sampai saatnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah termasuk kegiatan pembinaan desanya dan pembinaan PKK-nya.

Dari lembaga-lembaga keagamaan seperti di daerah Paniai juga giat memberikan pembinaan kepada kaum wanita tetapi mereka terlepas dari pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata para misionaris inipun banyak manfaatnya bagi kemajuan masyarakat desa. Ada juga desa bahkan khusus mereka membentuk semacam pendidikan bagi wanita. Pemerintah Daerah juga berusaha dapat ikut membantu kegiatan mereka. Sebab kegiatan mereka ada kesamaannya dengan program PKK.

"Walaupun namanya bukan PKK tapi apa yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk kesejahteraan keluarga sebenarnya mereka lakukan. Malah ada pemberantasan buta huruf. Yang jelas peranan pihak agama ini banyak membantu dalam mengembangkan masyarakat di pedalaman Irian Jaya". Demikian Wanna dalam penjelasannya.

6. Usaha Pengadaan Bahan Pokok

Kebutuhan pokok di Irian Jaya masih banyak yang didatangkan dari propinsi lain. Dan inilah sering menimbulkan tingkat harga disini sangat tinggi.

Kepala Kanwil Perdagangan Propinsi Irian Jaya, JA Tugaran mengatakan bahwa masalah pengadaan kebutuhan bahan pokok di Irian Jaya selalu diatasi secara terpadu melalui suatu Tim Pemecahan masalah angkutan dan konsumtif. Dalam tim ini terkait beberapa instansi antara lain : Bulog, Pemda Irian Jaya, Kanwil Perhubungan Laut, Darat dan Udara dan beberapa asosiasi yang berkaitan dengan usaha-usaha pengadaan bahan pokok di Irian Jaya. Kemudian setiap sekali tiga bulan tim mengadakan rapat untuk mendengar masukan-masukan yang perlu segera diatasi.

Dan Tim inilah yang selalu bekerja untuk mengatasi masalah harga maupun penyediaan kebutuhan pokok bagi Irian Jaya sesuai dengan kondisi daerah. Kegiatannya senantiasa diarahkan secara terpadu.

Sebenarnya penyebab tingginya hanya terutama karena masalah transportasi yang sulit. Sehingga jika di Jakarta harga satu zak semen hanya Rp4.500,- maka di Wamena bisa sampai Rp20.000,-

Biasanya yang sering menjadi masalah adalah penyediaan daging sapi, telur, gula, terigu dan sebagainya.

Menyinggung masalah ekspor non-migas Turagan menyebutkan tahun 1982 jumlah ekspon non migas US$ 180 juta, tapi akhir-akhir

will be sent to Java for training and in order to make the comparative study observing the areas which have been developing their villages.

5. The Promotion of PKK

PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga = Programme for Family Welfare), as we know, is a self-standing organisation. However, for it has to do with the Government's programme of guidances, the activities of this organisation are outlined by the Central Govenment. As in the province, the promotor of PKK is the Directorate of Rural Areas' Development, while in the Central Government is the Directorate General of Rural Areas' Information Service. Besides the promotion (guidances) provided by the Government, from the level of Central Government down to that of sub-district,there is the so-called Team of Motivators of the PKK. Thus, in the framework of developing the rural areas, the PKK will always cooperate with the Provincial Team of Motivators of PKK in their daily activities so that the 10 programmes of PKK may be well-implemented. To do so, the PKK forms the working units. When the Team of Motivators wish to have one aspect of the main programmes implemented, Bangdes is expected to be capable to give guidances. It is also the duty of Bangdes to guide, to advise, to set forth opinion and the like. It is the duty of the Team of Motivators to establish the policies for implementing the 10 programmes. Later on, these 10 programmes will be implemented by the Team of Motivators of the PKK at the Provincial, district, sub-district and the lowest levels.

So far, one of the activities which has been done quite intensively in Irian Jaya is the training of cadres for the PKK motivators. Especially the cadres at the sub-district level, while the trainers are the members of the Provincial Team of Motivators.

The PKK receives financial aid for its activities both from the Central Government and the Governor of the Province through the APBD (Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah = The Budget for Regional Expenses) of the Province. Besides, a yearly financial aid of Rp250.000,- for each village is provided for the activities of the PKK in each village.

Apart from giving the up-grading courses, the other duties of both the Team of PKK Motivators ad the Directorate of rural Areas' Development are to monitor the developmental activities in districts, and to promote villages to pioneering villages in the implementation of the 10 main programmes of PKK. To Irian Jaya, Sentani is one of the pioneering villages in the implementation of PKK Programmes.

A village which has not met the administrative conditions of village will be promoted by the Subsidiary Office. In due time, the transmigration programme will be handed over to the Regional Administration including the activities of village guiding and of PKK promotion.

The religious institution are also active in promoting the women such as that in Panyai, but they are not related wit the Department of Education and Culture and therefore are not provided with the programmes of guidances by this department. It turns out that the religious mission have been very meaning ful to the development of the rural areas' inhabitants. Even there is one village where the Mission has founded a kind of educational institute for the women. The Provincial Government has also endeavoured to assist them in doing their activities, because theirs are almost the same as the Progrmmes of PKK.

"Although they do not name their activities PKK, these activities are just what a mother wishes for making her family wealthy. Even they also carry out the programme for eliminating the illiteracy. In short, those religious institutions have been so helpful to the efforts of developing the people in the isolated areas in Irian Jaya," Wanna commented.

6. The Efforts to Supply the Basic Material Needs

The basic material needs for Irian Jaya mostly still have to be brought from the other provinces. This often causes the prices of such basic needs to become very high.

The Head of Subsidiary of the Department of Trade in Irian Jaya Province, J A Turagan, pointed out that the problem in supplying the basic material needs for Irian Jaya had been always solved in an integrated way by the Team of Transportation and Consumption Problems Solving. This team involved several institutions such as the Bulog (The Board for Logistic Affairs), The Regional Administration of Irian Jaya, the Subsidiary of the Directorate General of Sea, land, and Air Communications in Irian Jaya, and other associations related with the efforts to supply the basic material needs for Irian jaya. Then, Turagan explained the team held a meeting for once within three monts in order to attain the inputs on which the actions to be taken were based.

It was this team which always worked in order to cope with the problems of high price and supplying the basic material needs for Irian Jaya in accordance with the conditions of the areas spreading over this region. Its activities were always made integrated.

In fact, the main cause of the high prices is the difficulty in transportation facilities. Accordingly, when the price of one sack of cement in Jakarta is only Rp4.500,- that in Irian Jaya will be up to Rp20.000,-

ini secara berangsur-angsur nampak adanya penurunan sehingga tahun 1985 nilai ekspor non migas yanya US$ 100 juta. Semua ini ada hal-hal yang berkaitan terhadap larangan pengeksporan kayu lok.

Bagi masyarakat pedalaman Irian Jaya banyak tergantung hidupnya dari komoditi ini. "Karena ini merupakan keputusan nasional maka kita tidak bisa menghindari dari keputusan tersebut. Terakhir kalinya malahan khusus untuk kulit buaya bahkan barang ekspor tapi tingkat purchesing daerah Irian Jaya ini nampak belum mampu sehingga kalau ini diberlakukan sama dengan Jawa, Sumatera maka Irian Jaya nampaknya akan mengalami sesuatu kesulitan. Jadi sebenarnya Irian Jaya ini belum waktunya untuk meningkatkan ekspor dalam tingkat purchesing. Saya kira itulah yang kita hadapi terhadap perdagangan di daerah ini", katanya lebih lanjut.

7. Investasi

Ditanya tentang pembinaan pengusaha, Turagan menyatakan, bila penanaman modal itu sangat penting untuk pembangunan, bagi Irian Jaya penanaman modal dianggap sangat penting dari yang penting. Terutama adalah karena menurunnya harga minyak akhir-akhir ini dan menurunnya produksi minyak di Irian Jaya sendiri, tampaknya tidak lagi ada alternatif lain selain untuk meningkatkan ekspor non migas. Hal ini dibenarkan juga oleh Ketua BKPM Irian Jaya Drs J Nasution. Apalagi menurut dia, Irian Jaya mempunvai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor yang dapat menghasilkan devisa negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa memang harus diakui bahwa potensi yang ada di Irian Jaya sekarang ada yang secara ekonomi menguntungkan dan ada pula yang kurang menguntungkan. Misalnya di daerah pedalaman. Meskipun di sana mempunyai potensi yang baik tetapi karena fasilitas perhubungan belum ada sebagai pendukung penanaman modal, maka belum mempunyai nilai ekonomis.

Karena daerah pedalaman masih relatif sulit maka setidak-tidaknya potensi di daerah pantai menurut Nasution perlu segera dipikirkan. Terutama sekali kelihatanya yang pada waktu sekarang itu adalah di sektor pertanian dalam arti yang luas. Jadi termasuk disitu peternakan, perkebunan, pertambakan, pertanian tanaman pangan. Di bidang industri kehutanan pada sekarang ini industri perkayuan nampaknya Irian Jaya belum bisa bersaing dengan propinsi lain. Ini terutama disebabkan oleh karena letak geografisnya yang jauh dari pemasaran dan juga transportasi yang belum secara rutin menjelajahi seluruh wilayah ini dan juga disini biaya produksi tinggi bila dibandingkan dengan propinsi lain. Ini disebabkan Irian Jaya dikenal sebagai daerah biaya ekonomi tinggi. "Mau tidak mau kita mengakui itu", katanya. Misalnya produksi di Dempaer, biaya produksi itu lebih tinggi dari pada di Jayapura sebab karena bahan bakar dari sini ke sana diangkut dengan jalan darat sehingga harga disana lebih mahal dari pada di kota Jayapura. Perkebunan kelihatannya cukup baik. Misalnya coklat. Di luar negeri itu permintaan terhadap coklat cukup tinggi US$ 2000 per ton, Irian Jaya belum bisa memenuhi pemasaran coklat walaupun kebun coklat banyak sekali, tapi produktivitasnya masih kurang. PT Perhutani II sudah harus mencoba kelapa sawit, tapi investor agaknya belum tertarik menanam modalnya di sini. Tentang pertambakan baru dimulai, terutama pertambakan udang. Selain itu peternakan buaya juga punya potensi cukup besar. Karena buaya dilindungi maka untuk mengambil kulitnya perlu diternakan terlebih dahulu. Disini ada juga perusahaan yang mendapat fasilitas dari Pemerintah yaitu PMA dan satu PMDN. Kemudian pertambangan yang ada sekarang yaitu pertambangan tembaga, yang memproduksi konsentrat tembaga. Ini ada di Freeport Tembagapura potensinya cukup besar. Rencana investasinya dulu US$ 142 juta tapi nyatanya sekarang sudah lebih US$ 400 juta. Tapi yang terbesar itu adalah Freeport yaitu Tembagapura yang terakhir realisasi investasinya telah mencapai US$ 406.785 juta sampai bulan Oktober 1986. Investasi tersebut belum termasuk investasi dari sub kontraktor dengan anak-anak perusahaan Dirgantara Air Service.

Nasution mengakui untuk menarik pihak swasta kebijaksanaan investasi di daerah ini belum begitu ketat. Sebab selain menunjang produksi juga membuka lapangan kerja. Ia mengambil contoh Freeport Tembagapura saat ini menampung 3000 tenaga kerja.

Dan pengaruh lain juga makin lama makin luas dan juga merangsang dinamika penduduk. Sebagai contoh Jayapura, Manokwari, dan Sorong merupakan daerah-daerah yang berkembang berkat banyaknya usaha investasi baik swasta maupun Pemerintah.

Berdasarkan itu menurut Nasution bagi daerah-daerah yang berpotensi perlu diarahkan penanaman modal swasta. Merekalah yang pertama-tama merintis jalan kesana dan orang akan berdatangan kemudian. Katakanlah industri perkayuan dan perkebunan.

Usually, the problems arise in supplying beef, eggs, sugar, flour and such.

Touching on the problem in the export of non oil-and-gas products, Turagan mentioned that the total value of non oil-and-gas export in 1982 was up to US$ 180 million. However, it seemed that the value was gradually decreasing during these few years so that by 1985 the value was around US $ 100 million only. It was to some extent due to the prohibition to export the log timber.

As to the inhabitants of isolated areas in Irian Jaya, the log timber is the commodity on which they rely their lives. "However, because this prohibition is the National Decision, we cannot but obey such decision. Even then the crocodile skin is also prohibited fo rexport. Such prohibiton will not cause any problem when it is apllied to the people in Java or Sumatera, but it does in Irian Jaya because the purchasing power of Irian Jaya is not so big as in those areas.Thus, it is actually not the time that Irian Jaya increases the export at the purchasing level. I think it's the problem we're facing in the field of trade in this area," Turagan said further.

7. Investment

On being asked about the promotion for businessmen, Turagan answered that if investment was an important thing to development, it was the most of the important things to Irian Jaya. It is mostly important to this area especially because of the decrease of Irian Jaya itself. Thus it seemed that there were no other alternatives except to increase the export of non oil-and-gas products. It was also confirmed by the Head of the BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal = Investment Coordinating Board) or Irian Jaya, Drs J Nasution. Moreover, according to him, Irian Jaya had great potentials for development in various sectors in order to bring in the foreign exchange. He went on to say that it should indeed be admitted that the existing potentials of Irian Jaya consisted of those which were economically favourable and those which were less favourable. For instance, the remote areas. Although there were some favourable potentials, these potentials would not be regarded favourable from the economic point of view because there were no supporting facilities for investment. As the inland areas were relatively difficult to reach. Nasution though that the coastal areas should be taken soon into consideration. The potential sector to be developed today was agriculture in the broadest sense. It should include the cattle farming, the plantation estate, the fish farming and the food-stuff farming. In the sector of forest industry, it seemed that Irian Jaya could not compete with the other provinces mainly in timber industry. It was due to its geographic location, so that it could not be reached by the market besides the lack of the transportation facilities and the high cost of production compared with that in the other provinces. It was because of the fact that Irian Jaya was and area of high economic cost. "We just can't argue that fact", he said. For example in Dempaer, the cost of production there was higher than that in Jayapura for the fuel form Jayapura was transported to that place by land. Plantation estate seemed to be fairly good. The example for this was cacao. The value of foreign demand was high enough, that was US$ 2000 per ton. However, Irian Jaya was still unable to meet the above demand although it had a large number of cacao plantation estates. This was due to its low productivity. PT Perhutani II (Perusahaan Terbatas Perhutanan Indonesia Dua = Public Limited Company of Forestry - Exploitation Area II) should have tried to plant palm trees, but investors were possibly not yet interested in investing their capitals there. As in the field on fish farming it was shrimp farming which had begun to be done. Besides, the crocodile farming was also greatly potential. For the crocodile was protected by law, should be a farming for breeding this kind of animal in order to utilise its skin. There were two such farmings in Irian Jaya which had been utilised the facilities provided by the Government. The first one was by the PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri = Domestic Investment) while the other one was by the PMA (Penanaman Modal Asing = Foreign Investment). Then, the mining company which existed there was found in Freeport Tembagapura and was greatly potential. The planned value of investment was US$ 142 million, but in realisation it had come up to US $ 400 milion. The copper mining in Freeport Tembagapura was that which had the highest value of investment, because the last value realised had been up to US$ 406.785 by the data of October 1986. This value of investment was exclusive from that of the sub-contractors along with the branch companies of the Dirgantara Air Service.

Nasution admitted that the policy of investment in Irian Jaya had been quite flexible in order to attract the private investors. It was owing to the thought that investment might also open job opportunities besides supporting the production. He took the Freeport Tembagapura as an example. This mining company was now employing 3000 personnel.

Moreover, investment might also stimulate the dynamics of the people. For instance, Jayapura, Manokwari and Sorong, which had become the developing areas owing to the investment both by the Government and the Private.

Based on these facts, Nasution thought that the private investors should then be directed to those potential areas. It was they who were supposed to become the pioneers in the development of those areas. Then, people would

Di Manokwari perusahaan perkayuan justru satu dampak yang positif untuk membuat Manokwari berkembang ialah berkat jalan yang dibuka oleh Perhutani. Sekarang Wamere dan Prabu sudah dapat dihubungkan. Jalan yang mereka buat sekarang berfungsi pula sebagai jalan umum. Para transmigran juga beruntung. Program PIR makin lancar. Di sini sudah dibuka 20.000 Ha untuk program PIR. Sekarang ini PIR Manokwari banyak peminatnya.

Demikian juga di Asoi yang dulu dibuka jalannya oleh PT Naroka. Fasilitas jalan yang mereka buat dulu saat ini memudahkan pengembangan program transmigrasi. Dewasa ini program transmigrasi Asoi di Koya merupakan salah satu yang terbaik di Irian Jaya. Berdasarkan itulah Pemda sangat mendukung usaha PT YULIMSARI untuk menamam modalnya dalam bidang industri plywood. Saat ini mereka baru bergerak dalam industri saw mill. Dan mereka sudah membangun jalan sepanjang 60 Km dan lebarnya 6 meter. Jalan ini bisa digunakan oleh masyarakat, Pemerintah dan perusahaan. Hal ini bukan mengecilkan Pemerintah karena jalan yang dibangun Pemerintah disekitar itu tidak sampai 6 meter lebarnya. Tapi menurut Nasution perusahaan itu kini mengalami kesulitan biaya produksi, terutama sejak adanya dampak resesi dan kebijaksanaan perkayuan ditambah devaluasi baru-baru ini. Tapi rupa-rupanya di tahun 1987 ini PT Yilimsari ingin bergerak lagi dan nampak sekarang mereka makin terbuka dan mempunyai suatu keberanian untuk berusaha. Lalu ada pula sebuah perusahaan yang tidak melalui PMDN bergerak di bidang penangkapan ikan. Perusahaan tersebut ialah PT BINTANG MAS.

Perusahaan ini kepunyaan WNA keturunan Hongkong. Karena Hongkong akan diambil alih oleh RRT, kemungkinan modal mereka itu akan ditanamkan di Irian Jaya dan mereka pun ingin menjadi WNI.

Sebenarnya masih banyak potensi daerah ini yang memerlukan penanaman modal seperti minyak pala, kopi, perikanan, pertambangan, dan lain-ain.

8. Sumber daya kehutanan Irian Jaya

Sukar untuk dibantah bahwa potensi hutan di Irian Jaya masih sangat dominan sebab dari luas Irian Jaya 41,06 juta hektar, masih ada seluas 40,6 juta hektar berupa areal hutan atau 97%. Jadi kalau dilihat dari sumber hutan maka ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Yang pertama adalah berupa sumber daya hutan berupa Plasma, merupakan sumber Genetik yang sangat besar. Diantara yang dapat kita jumpai di hutan Irian Jaya adalah jenis yang asli Irian Jaya misalnya jenis anggrek ada sebanyak 770 macam. Jenis yang asli Irian Jaya ada sebanyak 250 macam. Hal ini dikemukakan kepala Kanwil Kehutanan, Drs Panggabean kepada Tim Indonesia membangun.

Yang kedua dapat kita temui di Irian Jaya ini jenis-jenis pohon yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan industri pengolahan kayu sebab ada 250 jenis pohon yang baik untuk industri dan bahan bangunan. Dan ada 100 jenis pohon/kayu yang baik untuk jembatan, bahan bangunan dan komoditi.

Memang penggunaan areal hutan yang sedemikian itu masih sangat kecil sekali. Data 1970-1980 hasil devisa yang diperoleh dari Irian Jaya ada sebesar US$ 111 juta untuk hasil hutan. Kalau dibandingkan dengan produksi per tahun yang diperoleh di sini mulai tahun 1976 - 1980 itu merupakan tahun-tahun puncak kegiatan. Produk per tahun lebih kurang 310.000 M3. Sejak tahun 1985 kegiatan sudah berhenti, karena pada umumnya ekspor dengan lok atau kayu gelondongan/ bulat sudah dihentikan.

Disamping itu juga Hak Pemungutan Hasil Hutan sebanyak 139 unit. HPH mulai beroperasi di Irian Jaya pada tahun 1977. Dan tahun 1977 s/d 1985 ini hanya ada 40 HPH yang tinggal. Jadi hutan yang telah di HPH itu sebanyak 10.150.000 Ha. Namun sebagian besar sudah ada cadangan. Menurut Panggabean, sebenarnya hutan produksi ada 23.630.000 Ha. Di antaranya 26 HPH pengolah 10.150.000 Ha sedangkan sisanya dicadangkan untuk HPH yang belum diolah.

"Diharapkan dengan adanya hutan produksi yang besar di Irian Jaya ada dua pola pendekatan terhadap pengusaha hutan. Yang pertama HPH dengan investasi besar." Ini dapat diharapkan terhadap hutan-hutan yang potensial. Yang kedua adalah HPH dengan tidak menggunakan investasi besar. Misalnya dengan menggunakan **saw mill for table** atau saw mill yang dapat berpindah-pindah. Jadi saw mill jenis ini tidak perlu membutuhkan modal besar, yakni sekitar Rp50 s/d 70 juta", katanya.

Disamping itu Irian Jaya juga memiliki komoditi-komoditi hasil hutan lainnya, seperti minyak kayu putih di Kabupaten Merauke, yang

follow them. Say, these investors became the pioneers by establishing the timber or plantation industries.

In Manokwari, it was the plantation industry which had given the positive effect to this area. Manokwari had now been developing as there had been the main road which was made by the Perhutani. Nowadays, Wamere and Prabu had been connected with each other. The road which they had built had now been used as the public road. The transmigrants were also benefited. The PIR Programme had been running more smoothly. There were now some areas of 20.000 hectares available for the PIR. While the PIR Programme being implemented in Manokwari had by now obtained more participants.

It was true of Asoi which was benefited by the road made by PT (Limited Company) Naroka. The road that company built in the past years had facilititated the development of the transmigration programme. Today, the transmigration programme in Asoy, Koya, was one of the best in Irian Jaya. That was why the Regional Administration had supported the intention of PT Yulimsari to invest in the industry of plywood. Nowadays, that company had just begun by saw-mill. It had finished making the road having the length of 60 kilometres and the widht of 6 metres. This road could be used by the government, the people, and the company itself. It was not to say that the government had played minor part only because the road built by the government around this area was not so wide as the one built by that company.

By saying so, Nasution would only reveal that this company was now undergoing an economic trouble chiefly concerning the cost of production especially due the last economic recession, the government's policy on timber industry and the recent devaluation. However, by this year of 1987, PT Yulimsari was to be active again, and it seemed that this company was now becoming more courageous to face any challenge. Then, there was a PMA company which was active in fishing. The name of the company was PT Bintang Mas. It belonged to foreign citizen who was of Hong Kong origin. As Hong Kong was about to be taken over by the RRC (Republic Rakyat Cina = The People's Republic of China), it was possible that his capital was to be invested in Irian Jaya and that he became an Indonesian citizen. As a matter of fact, there were still numerous potentials which were in need of such investment, such as the nutmeg oil, coffee, fishery, mining and many others.

8. Forest Resource in Irian Jaya

There is no denying the fact that the forest potentials in Irian Jaya are so predominating for the width of Irian Jaya which is 41,06 hectares is composed from 40,6 hectares of forest areas or similar to 97 %. Thus, when touching on the natural resources, the forest resource is greatly potential to be developed. This forest resource consists of mainly the plasma, which forms the greatest source of genetics. Among the others to be found in the forests of Irian Jaya is the original plasma of this area, for instance, the orchids. There are 770 species of orchids in Irian Jaya. Whereas the indigenous orchids of Irian Jaya consist of 250 species. This was said by the head of Subsidiary of Forestry Office, Drs Panggabean to the Team of Indonesia Membangun.

The second plasma to be found there is that which consists of various kinds of trees useful for buildings and wood processing industries. There are 250 species of trees which are good for industry and buildings. The other 100 species are good for bridges, materials for buildings and as well as for commodities.

As a matter of fact, the forest areas utilised for the afore-mentioned purposes cover only a few widths. The data of foreign exchange by 1970 - 1980 indicates that the total amount of foreign exchange by forest produces of Irian Jaya was US $ 111 million. When compared with the annual production from 1976 to 1980, this period is te years of the peak production. This production has no longer lasted since 1985 owing to the decision to cease to cease the export of logs.

The exploitation of forest is by means of the HPH (Hak Pemungutan Hasil Hutan = The Licence for Obtaining Forest Produces). In Irian Jaya, which forests used to produce approximately 310.000 cubic metres of logs per year, the holders of HPH have been operating since 1977. There were formerly 139 units (holders) of HPH, but since 1977 up to 1985 there had been only 40 units which still remained. The width of the forest which had been exploited by the units of HPH since then was 10.150.000 hectares. However, certain forest areas had later been prepared to compensate for the exploited ones. According to Panggabean, the widht of the productive forest was 23.630.000 hectares. From which, 10.150.000 hectares were to be exploited by 26 units of HPH, while the rest was the reserve to be utilised by the other units of HPH.

"It is hoped that those forest potentials which are very productive may attract two kinds of businessmen in the line of forest produces. Firstly, the holder of HPH who has big investment value. Such as businessman is expected to exploit the very potential forests. Secondly, the holder of HPH who has no big investment value. For instance, the unit of HPH who has no big investment value. For instance, the unit of HPH which uses a portable sawmill. This kind of sawmill doesn't need a big capital, it needs the capital which ranges from Rp50 to Rp70 million only", Panggabean described.

luas arealnya kira-kira 120.000 Ha. Hutan alam minyak kayu putih sampai sekarang belum dimanfaatkan. Yang lain adalah komoditi minyak Lawang yang terdapat di Kabupaten Fak-Fak, Merauke, Manokwari, dan Biak. Tapi masih dipergunakan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Irian Jaya juga potensi rotan yang sangat besar, hampir seluruh Irian Jaya yang kira-kira 1.000 meter di atas permukaan laut ada potensi rotannya tapi sekarang ini belum dimanfaatkan.

Dengan telah berkembangnya ramuan obat-obatan tradisional, seperti jamu, maka di Irian Jaya ini ada kulit Nasoi. Kulit Nasoi ini sangat baik untuk obat-obatan dan orang Belanda atau orang Barat yang datang ke Irian Jaya ini tertarik dengan kulit Nasoi ini. Tetapi kini penggunaannya belumlah populer. Damar yang diperoleh dari kayu jenis Agati, terdapat hampir di seluruh wilayah Irian Jaya yang ketinggian antara 200 - 700 meter dari permukaan laut. Disamping damarnya kayu jenis ini sangat baik untuk bahan bangunan.

Menyinggung masalah sumber plasma dan tata guna hutan kesepakatan, Panggabean menyebut di Irian Jaya Hutan Produksi Terbatas seluas 4,7 juta hektar atau 11,52%. Hutan produksi tetap 7,1 juta hektar atau 17,35%.

Kemudian sudah ada direncanakan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang penggunaannya oleh instansi-instansi lain secara sektoral seluas 11,8 juta hektar atau 28,26%. Hutan konversi ini yang dimanfaatkan oleh instansi lain, misalnya untuk Perkebunan, untuk perluasan sawah, perluasan kota, sudah dapat dicadangkan. Dari perencanaan-perencanaan tersebut tadi, dalam rangka melestarikan sumber daya alam hutan Irian Jaya sudah menunjukkan ada 31 lokasi cagar alam suaka marga satwa, luasnya 8,8 juta hektar. Diantaranya 23 lokasi untuk cagar alam, 6 lokasi untuk cagar marga satwa, dan 2 lokasi untuk Taman Nasional. Taman Nasional yang pertama yaitu Taman Nasional Loren yang luasnya ± 1,3 juta hektar dan yang kedua Taman Nasional Temramo. Loren di bagian Selatan dan Temramo di bagian Utara.

9. PIR Buaya

Disamping produksi kayu disini juga ada potensi buaya yang sangat besar. Dengan adanya hutan-hutan Payau, rawa-rawa dan sungai-sungai. Sebenarnya sungai-sungai disini sering berpindah-pindah alirannya sehingga habitat dari pada buaya berkurang dan luas wilayah untuk habitat 6,1 juta hektar dan menurut penelitian yang terakhir habitat buaya disini sebanyak ± 2,6 juta ekor. "Jadi lebih banyak jumlah buaya dari pada penduduk karena penduduk hanya 1,3 juta jiwa" Panggabean berguyon.

Mulai tahun 1980 buaya-buaya itu dilarang ditangkap, dan di Irian Jaya ini ada vang memang pemasarannnya baik, yaitu buaya air tawar. Kemudian buaya muara. Kalau sebelum tahun 1980 buaya dimanfaatkan untuk berburu tapi karena sekarang dilindungi, Pemerintah berusaha mengembangkannya dengan cara pemekaran. Anak buaya ditangkap dari alam kemudian dibesarkan di dalam kandang. Dengan ini kita jadikan suatu pola, dengan pola ini kita rumuskan yang disebut dengan perusahaan Inti Rakyat (PIR) penangkapan buaya. PIR buaya inilah yang sedang giat dimasyarakat. Para pengusaha sebagai perusahaan inti sedangkan masyarakatnya sebagai pelaksana. Jadi ada penangkap dan ada pengumpul, dan ini sudah mulai berjalan. Jadi perusahaan inti dan perusahaan pelaksana berkewajiban memuat kandang untuk mengumpulkannnya. Ini sudah mulai dilakukan di Jayapura.

Menurut Panggabean dengan adanya PIR Buaya diharapkan kebiasaan berburu atau menangkap buaya beralih kepada pemeliharaan buaya. Jadi diperkirakan 25 tahun yang akan datang disini sudah ada yang disebut sebagai ternak buaya.

10. Industri Pengolahan Hasil Hutan

Para pemegang HPH di Irian Jaya diharapkan juga ikut memikirkan pembangunan regional maupun pembangunan nasional. Potensi hutan dalam pengusahaannya harus mempunyai sasaran terutama membuka daerah-daerah terisolir.

Dalam penyerapan jumlah tenaga kerja ini, satu HPH bersama sawmillnya diharapkan minimal dapat menampung 1.500 tenaga kerja.

Industri ply woodnya dapat menyerap 4.000 orang tenaga kerja. HPH dengan pabrik Integrated Industry, (ada plywood, drayter, sawmill) dapat menyerap 4.000 sampai 5.000 tenaga kerja.

Besides the forest produce described above, there area some other forest produces of Irian Jaya. Among the others is the cajuput trees are planted is about 120.000 hectares. The natural forest which consists wholly of the cajuput trees has not as yet been utilised up to this time. Another forest produce is the Lawang oil from Fak-Fak, Merauke, Manokwari and Biak Districts. However, the exploitation of the Lawang oil is still in the traditional ways by the local inhabitants. Moreover, the forest of Irian Jaya also produce rattan in a very large number. Almost all parts of Irian Jaya which are about 1.000 metres above the sea level have the rattan potential, which has :ot as yet been utilised up to this present time.

In line with the development of the herbal medicines like those called "jamu", Irian Jaya has the raw material for such a herbal medicine known as the Nasoi skin. This Nasoi skin has been famous for its benefit in curing the sick persons. Even the Dutchment besides the other Westerners who are visiting Irian Jaya are also interested in this skin Unfortunately, the Nasoi skin is not yet popular in use the traditional medicine can be found in most parts of Irian Jaya which are located on the land of between 200 and 700 metres above the sea level. Besides the resin obtained from this Agati wood, the wood itself is very good for use as the materials for buildings.

Talking about the source of plasma and the management of forest, Panggabean specified that the forest of Irian Jaya was composed from the Hutan Produksi Terbatas (Limitedly Productive Forest) which had the width of 4,7 million hectares or similar to 11,52 %, and the Hutan Produksi Tetap (Constantly Productive Forest) having the width of 7,1 million hectares or 17,35 %.

Then, there has been a plan to prepare the Productive Forest wich will be able to be converted to being used by the other institutions by sector wich is 11,8 million hectares wide or similar to 28,26 %. This conversion forest will be able to be exploited by other institutions, for instance, for the purpose of plantation project, for that of rice-field extension and for the sake of urban extention. Such a plan of preparation has now been implemented. In the effort to make the forest resource ever-lasting, the plan to establish a reservation forest has also been carried out. The result is that there are 31 locationss which are now being used as the reservation forest. The width of the whole 31 locations is 8,8 million hectares. From those 31 locations, 23 are for plantation reservation, 6 for animal reservation and the other 2 for the National Parks. The first one is the Loren National Park, which is around 1,3 million hectares wide, and the second is the Temramo National Park. The Loren National Park is located in the southern part, while the Temramo lies in the northern part.

9. The PIR of Crocodile

Besides timber as the land produce of Irian Jaya which is of great potentiality, crocodile has also been a potential commodity. The crocodile can be found easily in this area as there are lots of swamps, rivers and salty water. Actually the water stream of rivers in this area keeps changing from time to time in different directions. Accordingly, the habitat of crocodiie has widened by itself. The width of the habitat is 6,1 million hectares, while the number of the population of crocodile according to the last survey is approximately 2,6 millions. "So it's greater than the number of people for there are only 1,3 inhabitants", Panggabean said jokingly.

Ever since 1980, the people have been prohibited from catching the crocodile. In fact, there are two kinds of crocodiles of Irian Jaya which have become good commodities and which already have a good market. They are the river crocodile and the sanctuary crocodile. Today, as it is no longer allowed to hunt and catch the crocodile for commerce, the government has made an effort to breed this animal. A young crocodile is caught from its natural habitat, and is then grown up in the cage. This pattern is named the PIR (Perusahaan Inti Rakyat = The People's Nucleus Company) of Crocodile Farming. This PIR is now being actively popularised. The investors in this farming are supposed to become the nucleus companies, while the local inhabitants to become the operators. Thus, there are the crocodile catchers and there are the crocodile breeders. Such activities have been going on in Jayapura. Both of the nucleus companies and the operating companies are obliged to erect the pond-cages for the purpose of breeding the crocodile.

Panggabean informed that by the PIR of crocodile, it was hoped that the habit of hunting or catching the crocodile would then be changed into that of breeding. Thus, it was estimated that 25 years later, there would be the so-called crocodile farming estates in Irian Jaya.

10. The Processing Industry of Forest-Produces

The holders of HPH in Irian Jaya are supposed to also be involved in thinking of the regional and as well as the national development. The exexploitation of forest potentials must have the useful target especially that of breaking through the isolated areas.

As in the employment, it is expected that a unit of HPH along with its saw-mill can absorb the manpower of 1.500. The industry of plywood is capable to employ 4.000 persons. A unit of HPH which runs an integrated industry (consisting of plywood, drayter and saw-mill) may be capable to absorb the manpower of 4.000 to 5.000.

Pengolahan hasil hutan disini telah ada 3 perusahaan besar, yakni PT MUTANI II di Manokwari, dia mempunyai saw mill kapasitas 7.000 m3 per bulan, tapi produksinya sekarang ini baru mencapai 5.000 m3. Yang kedua ada di Jayapura yaitu PT HANURATA, dengan kapasitas terpasang 5.000 m3 per bulan, dan produksinya sekitar 1.500 m3 per bulan. Yang ketiga PT INUSARI yang bergerak di bidang penggergajian/sawmill dengan produksi terpasang sekitar 3.000 M3 per bulan tapi sekarang ini perusahaan tersebut belum berproduksi. Sekarang ini di Wapura dekat Kabupaten Panea sudah direncanakan suatu perusahaan Integrated Industry. Jadi nanti disana ada ply wood, ada saw mill, ada drayter, ada bermacam macam lagi dalam pengolahan kayu dan dalam tahun 1987 ini diharapkan telah mulai pelaksanaan pembangunannya yaitu perusahan yang memegang HPH-nya yaitu PT THAI IKARYA.

"Seperti saya katakan bahwa Irian Jaya sudah direncanakan ada 31 lokasi untuk konservasi dan disitulah kita awetkan atau kita konservasikan semua jenis-jenis yang mewakili jenis-jenis kayu Indonesia atau regional", kata Panggabean.

There are 3 big companies exploiting the forests, they are PT Mutani II in Manokwari, which has the saw-mill with capacity of 7.000 cubic metres per month but is now capable to reach only 3.000 cubic metres; PT Hanurata in Irian Jaya having the installed-capacity of 5.000 cubic metres per month producing about 1.500 cubic metres each month; and PT Inusari which is active in sawing (utilising saw-mill) and has the installed capacity of production of 3.000 cubic metres per month but is not yet operating. Today, there is a plan to construct an integrated industry in Wapura near the Panea District. So there will be a company being active in producing plywood, sawing-work, drayting and in various processing of wood. By this year of 1987, it is expected that this industry holding the HPH namely PT Thai Ikarya will be starting the construction.

"Just like what I've described, there's a plan to make 31 locations the concervation areas. It's in those areas that we will conserve all species of woods which represent the species of woods of Indonesia or of the regions in this country," Panggabean confirmed.

BERBAKTI KEPADA IBU PERTIWI

**Membangun Hari Ini Untuk Esok,
Mewujudkan Masyarakat
Adil dan Makmur!**

Propinsi TIMOR TIMUR



SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

Pemerintah Daerah Timor Timur menyambut baik penerbitan Buku "INDONESIA MEMBANGUN" karena buku ini memuat dan menyajikan gambaran umum mengenai keadaan daerah dan Strata Sosial kehidupan masyarakat serta dapat pula diketahui tingkat kemajuan dan perkembangan daerah yang merupakan hasil-hasil pembangunan dari Repelita ke Repelita di Propinsi Timor Timur.

Propinsi Timor Timur yang baru akan memasuki usia 11 (sebelas) tahun pada tanggal 17 Juli 1987 menunjukkan bahwa telah mengalami ketinggalan selama 31 tahun menikmati kemerdekaan dan juga mengalami ketinggalan selama 2 (dua) kali Repelita sehingga untuk mewujudkan Propinsi Timor Timur kedalam Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam tidak ada jalan lain kecuali harus bekerja keras melaksanakan pembangunan.

Kenyataan historis yang mengawali perjalanan dan bangkitnya Timor Timur mencapai kemerdekaan dengan berintegrasi kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun diwarnai dengan berbagai hambatan dan rintangan tetapi berkat perjuangan yang gigih serta didorong oleh rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi dari seluruh Bangsa Indonesia maka perjuangan demi perjuangan telah meraih keberhasilan. Kenyataan-kenyataan historis itu sekaligus juga membuktikan bahwa Timor Timur adalah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menyadari segala kekurangan dalam menyusun buku ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas partisipasi dan kerjasama demi terbitnya buku ini.

Menurut sementara ahli, sejarah adalah kejadian dimasa lalu yang belum selesai dan proses sejarah tidak akan berhenti pada satu kurun waktu tertentu. Karena itu, penyempurnaan terhadap buku ini dimasa mendatang masih perlu dilakukan.

Demikian untuk menjadi maklum dan marilah kita lanjutkan perjuangan kita melaksanakan pembangunan untuk mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Terima kasih

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR



MARIO VIEGAS CARRASCALAO


TIMOR TIMUR

P.WETAR
P.LIRAN
P.KISAR
P.ATAURO (KAMBING)
Maumela
Manokoko
Makedade
P.ALOR
SELAT WETAR
SELAT OMBAI
Tg.Hero
Lantem
Jaon
Tutuala
JAKO
Beru
Tg.Bandura
Tg.Laivai
Raimaro
BAUKAU
Kaerabela
LOSPALOS
Luro
Laga
Lagumau
Bagua
Kaikai
Uatokarboa
Iliomar
Tg.Lore
Uatolari
Aliambata
Tg.Subao
Lamsana
Laleia
Vemassa
Vanilale
1750
MUNDOPERDIDO
Ossu
VIKEKE
Bibiluto
Tg.Beako
Laklubar
Metinaro
Lakio
MANATUTO
Laklubar
Barike
Fatoberliu
Tg.Fatukama
KOMORO
DILI
Biduku
Remeksio
Laulara
AILEU
Lekidu
Turiskai
Maubisse
SAME
Alas
Manufai
Tg.Gulio
LIKISIA
Maubara
Tg.Parimbala
Bazartete
Fatumasin
HUTABULE
1456
ERMERA
Hotolia
Tahuro
Kailako
Atabai
Bebau
Fatularan
Kailako
Hatobuiliko
Atsabe
AINARO
Batugade
Balibo
MALIANA
Bobonaro
Mapa
Tg.Tuameseh
Tg.Bestiam
PANTEMAKASSAR
Kulham
Oekussi
Nitibe
Oesilo
Kritana
Passabe
Pobetes
Lolotoi
Hatobudo
Tg.Lalete
Fatomean
Fatolulik
Foborein
1785
TARDMAN
SUAI
Tilomar
Tg.Tafara
NUSA TENGGARA TIMUR
LAUT TIMOR

B A B / *CHAPTER I*

M O N O G R A F I / *MONOGRAPHY*

1. Keadaan Alam dan Iklim

Propinsi Timor Timur merupakan propinsi ke-27 dan termuda dijajaran negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1976. Luas dataranya sekitar 14.609,375 Km² dan sebagian besar (13.672,00 Km²) terletak di bagian Timur Pulau Timor dan lainnya terletak di Daerah Kantung Ambenu (Nusa Tenggara Timur), Pulau Atauro serta Pulau Jaco.

Keadaan alam Propinsi Timor Timur pada umumnya terdiri dari daerah pegunungan yang membentang dari barat ke timur. Bentangan pegunungan ini adakalanya terputus sehingga membentuk lembah dan jurang yang curam serta dalam. Di daerah pegunungan ini banyak terdapat sungai-sungai kecil. Gunung Tatamailau merupakan gunung yang tertinggi, terletak di Kabupaten Ainaro. Daerah yang berupa dataran diperkirakan berkisar 20% dari luas seluruh daratan Timor Timur.

Pulau Timor terbentang antara 123°25' - 127°19' bujur Timur dan antara 8°17' - 10°22' lintang Selatan.

Lapisan tanah daerah Timor Timur terdiri dari kapur sedimenter, karang dan sedikit bagian pasir serta tanah yang tergolong vulkanis. Karena itu kondisi tanahnya kurang mampu menyerap air, sehingga air sungai sering meluap dan mengakibatkan banjir.

Sungai-sungai yang terdapat di Propinsi ini antara lain : Sungai Laclo di Manatuto, Sungai Seical di Baucau Bulobo, Sungai Maboro, Sungai Malibaka dan Sungai Nunura/Babae di Bobonaro, Sungai Gleno di Ermera, Sungai Karau-Ulum di Manufahi, Sungai Dilor, Sungai Luka, Sungai Vetuko, Sungai Bebui dan Sungai Irabere di Viqueque, Sungai Loes di Liquisa dan Sungai Tono di Ambeno, hampir seluruh sungai airnya mengalir sepanjang tahun.

Iklim pada umumnya hampir sama seperti daerah Indonesia lainnya. Yang tergolong iklim tropis dengan suhu udara terendah dan rata-rata 18°C. Sedangkan suhu yang tertinggi antara 26°C - 32°C.

Pada bulan tertentu daerah suhu udara berubah karena dipengaruhi oleh daerah Sub Tropis dari Benua Australia.

Musim hujan setiap tahunnya di bulan Desember sampai April. Sedangkan bulan Nopember dan Mei merupakan musim peralihan, bulan Juni sampai bulan Oktober merupakan musim kemarau dan temperatur umumnya cukup tinggi.

2. Penduduk

Propinsi Timor Timur termasuk dalam struktur perekonomian yang sama dengan daerah lainnya di Indonesia, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari sektor pertanian, hal ini terbukti 95% penduduk bekerja pada sektor ini.

Jumlah penduduk Timor Timur menurut sensus penduduk 1980 tercatat 555.350 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 283.280 jiwa, dan perempuan 272.070 jiwa, dengan penyebaran penduduk rata-rata 38 orang/km. Sedangkan menurut proyeksi 1986 tercatat 628.998 jiwa tersebar di 23 Kabupaten dengan penyebaran kurang merata, urutan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Dili 90.903 jiwa, Kabupaten Bobonaro 71.361 jiwa dan Kabupaten Baucau 68.737 jiwa. Lihat Tabel I-1.

Di Propinsi Timor Timur terdapat sekitar 30 kelompok **etnolinguistik.** Secara umum bahasa yang dipergunakan penduduk dapat dibagi menjadi 2 keluarga **linguistik,** yaitu keluarga bahasa **Austronesia** dan keluarga bahasa **non Austronesia. Bahasa Tetun** merupakan bahasa daerah yang dipergunakan penduduk. Tebe-tebe dikenal sebagai salah satu tarian yang umum digemari penduduk.

Pengaruh agama Katolik meluas dalam kehidupan sosial-religius penduduk Timor Timur. Menurut Sensus tahun 1980, lebih dari 90% penduduk Propinsi ini pemeluk agama Katolik dan selebihnya memeluk agama Islam dan Protestan.

Sebagian besar penduduk Timor Timur terlibat dalam usaha pertanian tanaman pangan. Makanan pokok sehari-hari pada umumnya jagung. Namun sampai sekarang sebagian penduduk cenderung menukar makanan pokoknya menjadi beras. Hasil tanaman perkebunan yang terbesar adalah kopi dan dalam waktu dekat ini, cengkeh menjadi hasil tanaman perkebunan yang cukup berperan.

Potensi alam dari Propinsi ini antara lain garam alam, minyak bumi, mangan dan sebagainya. Sampai saat ini sebagian besar dari potensi alam tersebut masih belum dieksploitasi.

3. Flora dan Fauna

Luas areal hutan 121.000 Ha dan jenis tanaman yang tumbuh di daerah ini tidak banyak berbeda dengan jenis tanaman yang tumbuh

1 G e o g r a p h y

The Province of East Timor is the 27th and the youngest province in the ranks of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This is established by Law No 7 of 1976. Most of the land area in the Province, some 13.762.000 square kilometers from a total of 14.609.375 square kilometers is in the eastern part of Timor Island, while the remaining is the Ambenu enclave (East Nusa Tenggara), Atauro island and Jaco island.

In general, the topography of East Timor Province consists of mountainous area stretching from East to West. This mountain chain is sometimes interrupted and as such creating steep as well as deep valleys and ravines. Many small rivers are to be found in this mountainous area. Tataimalu is the highest mountain, situated in the District of Ainaro. Twenty percent of the total land area of East Timor is estimated to consist of flat land.

The island of Timor stretches between 123°25' — 127°19' east longitude and between 8°17' — 10°22' south latitude.

The soil layer in the East Timor region consists of sedimentary lime, coral and only a small portion of volcanic sand and soil.
And that is reason why the soil cannot easily absorb water, so that rivers frequently overflow and causing floods.

Among the rivers found in the Province are: Laclo River in Manatuto, Seical River in Baucau, Bulobo River, Malikaba River and Nunura/Babae River in Bobonaro, Gleno River in Ermera, Karau—Ulum River in Manufahi, Dilor River, Luka River, Vetuko River, Bebui River and Irabere River in Vequeque, Loes River in Liquisa and Tono River in Ambeno, and the waters of almost all the rivers flow throughout the year.

The climate is generally the same as in the other areas of Indonesia, tropical climate, with a minimum temperature averaging 18°C, while the maximum temperature varies between 26°C — 32°C.

During certain months, the temperature is influenced by the sub-tropical climate from the Australian Continent.

Annualy, the rainy season lasts from December till April, the dry season from June till October with temperatures quite high, while November and May are months of transition.

2 P o p u l a t i o n

The economic structure of East Timor's Province in similar to the other areas of Indonesia, where most of its people earn their primary income from agriculture. This is evident from the 95% of the people involved in this sector.

According to the 1980 census, the total population of East Timor Province was 555.350, consisting of 283.280 males and 272.070 females, with a population density averaging 38 persons per square kilometer..
While the 1986 projection showed a population of 628.998, living in 13 Districts and not evenly distributed. Presented according to the number of people, the District of Dili has a population of 90.903, the District of Bobonaro with 71.361, and the District of Baucau with 68.737. (See Table I — 1)

Tabel / *Table I — 1*

No.	KABUPATEN *District*	PENDUDUK *Population 1986*	L U A S *AREA KM*	DESA *Village*	KECAMATAN *Sub-district*
1.	D i l i	90.903	476.250	33	4
2.	Ambeno	43.383	778.125	18	4
3.	Kovalima	32.263	777.500	21	5
4.	Bobonaro	71.361	1.868.125	51	6
5.	Liquica	36.300	607.500	23	3
6.	Ermera	65.086	670.625	52	5
7.	Ainaro	46.920	1.196.875	29	5
8.	Aileu	19.002	760.000	34	4
9.	Manufahi	29.332	1.132.500	29	4
10.	Manatuto	27.763	1.794.375	29	6
11.	Vikeke	34.193	1.850.000	34	5
12.	Baukau	68.373	1.422.500	58	6
13.	Lautem	44.110	1.775.000	34	5
	J u m l a h TOTAL	628.998	14.609.375	442	62

di daerah Indonesia lainnya. Di daerah pegunungan lebih beraneka ragam dari pada tanaman yang tumbuh di pesisir. Di daerah pegunungan tumbuh berbagai jenis kayu-kayuan, seperti : kayu besi, kupaliptus hitam, kupaliptus putih, kayu jati, kayu merah, cendana dan sebagainya. Di pesisir pantai banyak terdapat hutan bakau yang cukup lebat.

Rusa, kera, musang dan berbagai jenis burung (nuri, kakatua dan sebagainya) hidup di seluruh Timor Timur. Di beberapa Kabupaten seperti Lautem, Bobonaro dan Manatuto terdapat padang rumput yang cukup luas dan banyak penduduk yang mengembalakan kerbau, kuda dan sapi. Selain itu di seluruh daerah, penduduk kebanyakan beternak kambing, babi dan ayam.

Jenis binatang buas seperti harimau, tidak diketemukan di Propinsi ini. Namun sebaliknya berbagai jenis serangga (misalnya nyamuk) banyak terdapat di pesisir daerah ini.

4. Bahasa

Bahasa nasional masih belum begitu difahami. Tentunya bisa dimengerti, sehubungan Timor Timur baru 11 tahun berintegrasi dengan Indonesia. Sehingga bahasa daerahlah yang sering dipergunakan, dalam pergaulan sehari-hari.

Bahasa Daerah

Keadaan alam Timor Timur yang bergunung-gunung, praktis daerah satu terpisah letaknya dari daerah yang lain. Sehingga terdapat bahasa daerah yang saling berbeda. Diantara bahasa-bahasa daerah, bahasa Tetun yang paling sering digunakan masyarakat. Kita catatkan sejumlah bahasa daerah, berikut wilayah yang mempergunakannya :

- Tetun : di sekitar perbatasan dengan Nusa Tenggara Timur, di sekitar Dili, Suai dan Viqueque.
- Kemac : daerah sebelah barat - Atsabe.
- Bunak : sekitar Bobonaro dan sebagian di perbatasan Nusa Tenggara Timur.
- Mambai : sebelah selatan Dili sampai pantai selatan (Aileu, Ermera, Ainaro, Same dan Maubusse).
- Galoli : sebelah timur Dili (Motinaro, Manatuto dan Laclubar).
- Idate : bagian pedalaman tengah daerah Laklubar.
- Cairui : sebelah selatan Baucau dan utara Lacluta.
- Makasai : pantai utara Baucau dan tengah/timur.
- Midiki : di daerah Venilate.
- Naumic : daerah Baguia.
- Naueti : Vemasse.
- Dagada : ujung sebelah timur sekali, Los Palos, Tatuala dan Lautem.
- Waikenu: Oekussi dan Ambeno.

Bahasa Tetun

Dengan beraneka ragam bahasa daerah, masyarakat tidak merasakan adanya persatuan bahasa. Namun hal ini teratasi juga oleh adanya bahasa Tetun yang agak merata dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Timor Timur. Karena bisa dianggap sebagai bahasa perantara umum. Jika secara **Athropogenitis,** terdapat kontradiksi tentang asal-usul penduduk maka dalam bahasapun terdapat **heterogeniteit.** Apabila kita dalami bahasa Tetun, terlihat tanda-tanda adanya pengaruh yang kuat dari bahasa Indonesia.

5. Sejarah dan Pemerintahan

Menurut para ahli antropologi, asal suku bangsa yang mendiami gugusan Pulau Timor, sama dengan asal penduduk Indonesia lainnya. Sekalipun ada beberapa teori migrasi, tetapi diantaranya ada yang dapat diterima dan diperkirakan mendekati kebenaran. Disebutkan antara lain migrasi bangsa Austronesia dari tanah asalnya - daratan Asia - berlangsung secara bertahap ke berbagai bagian Kepulauan Asia Tenggara termasuk Timor Timur. Dari sini kemudian terdapat lagi pusat penyebaran baru yang mengakibatkan lahirnya sejumlah bahasa yang terpengaruh oleh dialek setempat. Berdasar garis keturunan (Ras), kita ketahui berbagai jenis ciri fisik. Namun perbedaan jasmani tidak identik dengan perbedaan bahasa. Dilihat dari sudut kebudayaan, percampuran terjadi pada masa lampau. Ditinjau dari sudut kebudayaan, suku bangsa-suku bangsa di Timor Timur tidak menunjukkan perbedaan besar. Hanya di sana-sini masih nampak adanya **sub stratus** kebudayaan pra Austronesia.

Sumber tertulis paling tua mengenai Pulau Timor adalah Naskah **Nagarakertagama,** yang berasal dari pertengahan abad ke-14. Di sini Pulau Timor disebut sebagai pulau Nusantara lainnya. Dimasukkan dalam kelompok nama-nama yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa, yang mengirimkan hasil bumi (sebagai upeti) kepada Majapahit.

In the Province of East Timor there are some 30 ethnic linguistic groups. In general, the language used by the population can be divided into two linguistic families, i.e. the language family of Austronesia and that of non-Austronesia. Tetun is the local/language used by the population. Tebe-tebe is one of the popular dances.

There is widespread influence of the Catholic religion in the socio-religious life of the people of Est Timor. According to the 1980 census, more than 90% of the population of this Province embrace the Catholic religion, and the remaining are Moslems and Protestants.

The majority of the people of East Timor is involved in agriculture, planting food crops and their staple food is generally corn. Yet, at present, part of the population with corn as staple food has a tendency to switch into rice. The major estate crop is coffee, but before long, cloves will play a significant role as estate crop.

This Province has a potential of mostly, still unexploited natural resources, such as salt, crude oil, manganese, etc.

3 Flora & Fauna

The total forest area is 121.000 ha and vegetation in this area does not differ much from the other areas of Indonesia. There is more variety of vegetation in the mountainous areas than that in coastal areas. In the mountainous areas grow various species of trees, such as : iron wood, black eucalyptus, white eucalyptus, teak, red wood, sandalwood, etc. In the coastal areas there is quite dense mangrove forest.

Deer, monkeys, civet cats and various species of birds (parrots, cockatoo/kakatua, etc.) can be found in the whole of East Timor. In several Districts such as Lautem, Bobonaro and Manatuto are sufficient vast meadows where the people herd buffaloes, horses and cows. Furthermore, in the whole area, most of the local people raise goats, pigs and poultry.

There are no wild animals such as tigers in this province. On the other hand, in the coastal area can be found various kinds of insects (for example, mosquitoes).

4 Language

In view of its relative short period - eleven years - of integration with Indonesia, the national language is not yet widely known, understood and used. So that in daily life, the local language is more frequently used.

Local Language

The mountainous landscape of this area which practically separates areas from each other resulted in the presence of various local languages. Among the local languages, Tetun is commonly used in addition to the other local languages. The areas where the language is used are as follows:

- *Tetun : around the border with East Nusa Tenggara (NTT), Dili and surroundings, Suai, Viqueque.*
- *Kemac : in the western region - Atsabe*
- *Bunak : around Bobonaro and part of the border with NTT.*
- *Mambai : South of Dili up to the southern coast (Aileu, Ermera, Ainaro, Same and Maubisse).*
- *Galoli : East of Dili (Motinaro, Manatuto dan Laclubar).*
- *Idate : in the Central hinterland of the Laklubar area.*
- *Cairui : South of Baucau and North of Lacluta.*
- *Makasai : the northern coast of Baucau and Central/East.*
- *Midiki : Venilate area.*
- *Naumic : Baguia area.*
- *Naueti : Vemasse.*
- *Dagada : the most eastern tip, Los Palos, Tatuale, Lautem.*
- *Waikenu : Oekussi, Ambeno.*

The Tetun Language

With the variety of local languages, the people in each area do not feel the presence of a unifying language. Nevertheless, this problem is more or less overcome with the presence of the Tetun language which is rather widely understood by the majority of the people and considered as common parlance.

If anthropogenetically there is contradiction in the origin of people, there is heterogenity in language and further study of Tetun will indicate influence of the bahasa Indonesia.

5 History and Public Administration

According to anthropologists, the origin of people living in the cluster of Timor island in the same as in the other areas of Indonesia. Although there are several migration theories, some of them are acceptable and presumed to be close to reality. It is said, among other, that migration of the Austronesian people from their country of origin - the mainland of Asia - took place in stages to the various islands of Southeast Asia, including East Timor. From here began a new centre for fanning out which resulted in many languages

Ini berarti waktu itu pulau Timor telah mengadakan hubungan dengan daerah-daerah di berbagai bagian sebelah barat Kepulauan Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan, pada dasarnya Timor Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kepulauan Nusantara, yang secara historis mempunyai kaitan yang erat.

Selain dari Nagarakertagama, informasi tertulis lainnya diketemukan dalam buku **Fei Hsin,** dengan judul **Hsing Ch'a Sheng-lan** atau **General Account of Peregrination at Sea** (1436). Diberitahukan bahwa gunung-gunung di Kihritimun, penuh dengan hutan kayu cendana, sebagai satu-satunya hasil dari pulau ini.

Jauh sebelum bangsa Barat menjajah Negara-negara Asia Barat dan Timur, penduduk Timor pernah mengenal sistem pemerintahan dengan pucuk pimpinan yang tunggal. Pemerintahan sentral ini tidak berarti absolut dan wewenang penuh, melainkan lebih merupakan suatu simbol kesatuan yang terwujud dalam ritual kepercayaan. Tatacara dan tatakrama antara kelompok-kelompok etnis berlainan. Pusat Pemerintahan berasal di Wehale dan kebanyakan orang Timor menganggap dirinya berasal dari Wehale, di daerah Belu Selatan. Kekuasaan tunggal yakni kekuasaan **Maromak O'an.** Menurut beberapa mitos, Maromak O'an berarti "Putra Tuhan" berasal dari langit. Ini menunjukkan, pada dasarnya pemimpin yang datang pasti berasal dari luar. Orang Atoni mengatakan bahwa ia datang dari belahan timur (neon sait, dari tempat matahari terbit). Sementara penduduk yang lebih dahulu menetap, menganggap asal mula bangsanya muncul dari bawah tanah.

Di Timor ada 2 suku bangsa besar yaitu **Atoni** dan **Belu.** Unsur pemerintahan dikenal berjumlah empat yakni : **Liurai** yang berkedudukan di **Fatu Aurip** (sebelah utara Wehale), **Sonba'i** (pemimpin orang Atoni) dan **seorang Liurai di Suai Kasamasa.** (daerah Belu terletak di Timor Timur) dan **Maromak O'an.**

Maromak O'an meliputi dua Liurai suku Bangsa Belu dan satu Sonba'i suku bangsa Atoni. Liurai dan Sonbai merupakan gabungan atau federasi dari wilayah keduanya. Suku-suku lain yang termasuk dalam federasi Wehale adalah suku Bunak di Lemaknen dan Kemak di Marobo, juga termasuk wilayah Wehale.

Pigafetta yang pernah berlabuh di Batugade Timor Tengah (tahun 1522 M), menulis bahwa ada 4 bersaudara yang menjadi raja di Pulau Timor. **Maromak O'an** seakan-akan hanya makan minum dan tidur serta bertugas menjaga benda-benda sakral di dalam uma lulik (rumah adat). Ia tidak berperan sebagai penguasa. Yang aktif sebagai penguasa adalah Liurai atau raja.

Untuk mengetahui sejak kapan Timor menjadi koloni Portugis, perlu ditinjau lebih seksama. Terutama menyangkut motivasi kemunculan mereka ke daerah ini. Kendati untuk itu, Portugis harus menempuh jarak yang relatif jauh dan harus menaklukkan gelombang laut yang terkenal ganas di Pantai Harapan, ujung Selatan Benua Afrika.

Saat itu, perdagangan serta komoditi rempah-rempah merupakan barang langka yang laku dan amat mahal harganya. Mereka tahu bahwa negeri asal rempah-rempah kebanyakan dari Pulau Timor.

Pada saat itu Portugis baru saja melepaskan diri dari kekuasaan Bangsa Spanyol dan baru mengalahkan Penguasa Muslim di Kesultanan Granadha. Dendam terhadap penguasa bangsa Arab, ditambah dikuasainya jalur perdagangan rempah-rempah dari timur juga oleh bangsa Arab, menyebabkan mereka berusaha untuk mencari negara asal rempah-rempah itu.

Dalam sejarah tercatat beberapa Ekspedisi untuk mencari negara asal rempah-rempah. **Columbus** beranggapan Dunia bulat. Ia berpendapat, bila berlayar terus-menerus ke barat, akhirnya akan sampai ke daerah tujuan. Seperti kita ketahui, Columbus merupakan orang pertama yang menemukan Benua Amerika.

Kegagalan Columbus untuk menemukan negeri asal rempah-rempah tidak membuat jera bangsa Barat. Dibawah Pemerintahan Raja Muda Portugis **Alfonso de Albuquerque,** kemudian diperintahkan untuk mengadakan ekspedisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah ke bagian Bumi sebelah Timur. Strategi yang mereka tempuh adalah mengadakan perjanjian dengan Negara setempat (penguasanya) kemudian disusul dengan berdirinya bandar dagang. Tetapi bila perlu mereka diperkenankan dan malah harus merebut daerah-daerah strategis yang merupakan jalur utama perdagangan. Hal ini menyebabkan bangsa Portugis merebut **Goa** tahun 1509, selanjutnya **Malaka** pada tahun 1511.

Saat itu kerajaan Islam sudah banyak berdiri di Sumatera dan pantai utara Pulau Jawa. Satu-satunya kerajaan Hindu di Jawa Barat, yaitu Pajajaran telah bersekutu dengan Portugis yang kemudian dihancurkan **Sultan Hasanuddin** dari Banten. Kemudian bangsa Portugis mencari jalan pintas ke sebelah utara, untuk mempersingkat waktu perjalanan ke daerah asal rempah-rempah yaitu Maluku. Tempat-tempat persinggahan Bangsa Portugis adalah Makassar dan Ternate. Di Ternate, mereka sempat mendirikan benteng dan bandar perdagangan, tetapi

and dialects. Though racially we can observe a variety of physical characteristics, this difference is not identical with the difference in language. From the cultural point, the mixture took place in the past. Culturally, the ethnic groups in East Timor do not show major differences. Sporadically, there is still pre Austronesian ***sub stratus*** *culture.*

The oldest written souce concerning Timor island is the ***Nagarakertagama*** *Document, originating from the middle of the 14th Century. In this document the island of Timor is mentioned as one of the Archipelago's other islands, included in the group of names situated east of Java which sent agricultural produce (as royalty) to Majapahit.*

It means that at that time Timor island had contacts with areas in the western part of the Archipelago. So, it can be concluded that basically, East Timor has been an inseparable part of the Archipelago, which historically had close ties.

Apart from Nagarakertagama, other written information can be found in the book of Fei Hsin entitled ***Hsing Ch'a Shen-lan*** *or* ***General Account of Peregrination at Sea*** *(1436). It mentioned that the mountains in Kihritimun were dense sandelwood forest, the sole product of this island.*

Maromak O'an consists of two Liurai from Belu ethnic group and one Sonba'i of Atoni ethnic group. Liurai and Sonba'i constitute a federation of both regions. Other ethnic groups included in the Wehale federation are the Bunak ethnic group at Lemaknen and the Kemak ethnic group at Marobo, also belonging to the Wehale region.

Pigafetta, *who once anchored at Batugade, Central Timor (1522) wrote that behind the island there were four brothers who became king on the island of Timor. And the Maromak O'an, as if only for drinking and sleeping, assigned to look after sacred items in the uma lulik (adat house). He is not the man with authority, this role is performed by the Liurai or king.*

A further study is required in order to know when Timor started to become a Portuguese colony. Especially, their motivation to appear in this area. Although to accomplish it the portuguese had to cover a relative long distance and had to conquer the savage waves at the Cape of Good Hope, at the southern tip of South Africa.

At that time, species were rare trade commodities, but selling very well at high prices. They knew that most of the species came from Timor island.

Also, at that period the Portuguese had just freed themselves from Spanish domination and defeated the Moslem rulers of the Granada Sultanate. The grudge against the Arab rulers, in addition to the Arabs controlling trade lanes of spices from the East, forced them work harder in finding the country of origin of those spices.

Long before Westerners colonized countries of West and East Asia, the people of Timor were already familiar with a form of government with single authority. However, it does not mean that the central government had absolute power, it was mere a symbol of unity which manifested in rituals of confidence, customs and traditions and ethical code between various ethnical groups. This central government originated in Wehale and most Timorese consider themselves to come from Wehale, an area south of Belu. The single authority is called the authority of ***Maromak O'an.*** *According to several myths, Maromak O'an means "Son of God", originating from heaven. This showed that basically when a leader arrived he must be from abroad. According to the Atoni people, from the eastern hemisphere (****neon sait****-from where the sun rises). While according to earlier settlers, they considered their origin to be from below the surface.*

In Timor there are two big ethnic groups, i.e. ***Atoni*** *and* ***Belu.*** *With regard to government or administration, four elements are known, namely, the* ***Liurai (raja)*** *residing at Fatu Aruip (north of Wehale),* ***Sonba'i*** *(leader of the Atoni people) and a Liurai at Suai Kasamasa (Belu area in East Timor) and* ***Maromak O'an.***

History recorded several expeditions to find that country of origin. ***Columbus*** *thought the world to be round and by continuous sailing to the west, one will arrive at his destination. It is well known that Columbus was the first man to discover the American continent.*

The failure of Columbus to discover the land of irigin of the spices did not discourage westerners. Under the rule of Portuguese Viceroy, Alfonso de Albuquerque, an expedition was ordered to look for spice producing areas in the eastern hemisphere. They pursed a strategy of concluding treaties with local authorities, followed by establishing a trade port in that country. But, if required, they were even entitled to take by force strategic areas which constituted a main trade lane. This was the reason for the Portuguese seizing ***Goa*** *in 1509, and then* ***Malaka*** *in 1511.*

At that time, in Sumatra and Java's northern coast already existed many Islamic kingdoms. The only Hindu kingdom in West Java, namely Pajajaran, concluded and alliance with the Portuguese but was crushed by Sultan Hasanuddin of Banten. Then the Portuguese looked north for a short cut in order to reduce travel time to the Moluccas, the land of the spices. They made Makassar and Ternate as stop overs. At Ternate, the Portuguese were able to build a fortress and a trading port, but encountered resistance from the Sultan of Ternate as well as the Dutch.

mendapat perlawanan dari Sultan Ternate serta Bangsa Belanda.

Akibat tekanan dari berbagai pihak, Bangsa Portugis kemudian memilih Solor di Kepulauan Sunda Kecil (Nusa Tenggara Timur sekarang) dijadikan bandar perdagangan dan pusat penyebaran Injil. Benteng pertama di Solor (1566) didirikan oleh **Ordo Dominikan** dengan tujuan melindungi kampung-kampung Kristen yang kemudian dikenal dengan nama **Tupas.** Akibat desakan-desakan dari Belanda, pusat kegiatan Portugis dipindahkan ke Larantuka (1613). Pemukiman tetap di Timor didirikan oleh Padre Michael Rangel (1613 M), di Silabau (sebelah Barat Atapupu). Sejak saat itu pengaruh Portugis dominan di Timor melalui kegiatan penginjilan.

Saat itu masyarakat telah mengenal kerajaan yang berkedudukan di Wehale. Sejak kehadirannya, bangsa Portugis selalu mendapatkan perlawanan dari masyarakat dan raja Timor. Namun kesatuan dan persatuannya amat rapuh. Disatu fihak raja Wehale merasa disaingi Portugis, di lain fihak raja-raja bawahan Wehale ingin memisahkan diri dari kesatuan Wehale. Melalui perjanjian persahabatan dengan raja-raja bawahan Wehale, Portugis pun berhasil menguasai Timor.

Menurut **Schule Nordholt** peristiwa itu terjadi pada tahun 1642 M. Pasukan Portugis dibantu oleh pasukan Tupas. Gabungan pasukan ini berhasil menguasai Timor. Semenjak itulah kesatuan Kerajaan Wehale tinggal namanya saja.

Masyarakat Tupas, berasal dari percampuran bangsa-bangsa India, Afrika dan Asia Tenggara yang berkeluaga dengan penduduk pribumi. Ciri khas masyarakat ini selalu bertopi. Tupas berperanan penting dalam sejarah Pulau Flores dan Timor.

Karena bangsa Belanda selalu mendapat angin dan berhasil mengalahkan bangsa Portugis di beberapa daerah di Kepulauan Nusantara, mereka selalu bertekad untuk mengenyahkan Portugis dari seluruh wilayah ini. Pada tahun 1660 M, Belanda berusaha mengusir Portugis di Larantuka, tetapi tidak berhasil. Kedudukan Portugis semakin kuat. Bahkan pada tahun 1662 M mengadakan perjanjian damai dengan Belanda.

Tahun 1681 M, Pulau Timor dan Solor secara resmi menjadi bagian dari Kerajaan Portugis. Tetapi selama itu pula bangsa-bangsa dan kerajaan pribumi mengadakan perlawanan mengenyahkan bangsa penjajah. Untuk mempertahankan kedaulatannya, raja-raja pribumi kadangkala melakukan politik adu domba antara Portugis dengan Belanda. Pada tahun 1705 M, penguasa Portugis menjadikan Lifau dekat Oekusi sebagai ibukotanya. Kota ini dikepung oleh Tupas hampir 3 tahun lamanya. Tetapi bangsa Portugis masih bisa bertahan berhubung selalu mendapat bantuan dari raja-raja pribumi tertentu.

Sasaran serangan Tupas bukan hanya Portugis, tetapi Belanda di Kupang pun tak luput. Serangan besar terjadi pada tahun 1749 yang terkenal dengan **Perang Penfui.** Tupas mengerahkan 50.000 orang untuk menyerang kedudukan Belanda. Serangan berlangsung kembali tahun 1752 tetapi gagal. Pada tahun 1756 Belanda mengirimkan misi **Pravisina** yang mengadakan perjanjian dengan raja-raja pribumi, sehingga kekuasaan Tupas semakin terdesak ke Timor bagian Timur.

Pada tahun 1769 M, Gubernur Portugis yang mencari perlindungan di Kupang, melarikan diri ke Dili. Sejak saat itu Dili menjadi pusat kekuasaan Portugis dan semenjak itu pula resminya penjajahan Portugis dimulai di Timor Timur.

Tidak semua raja rela dijajah. Pada tahun 1779 Raja Luca mengadakan perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan itu merembet dan berlarut-larut diikuti oleh raja-raja lainnya.

Pergolakan-pergolakan serta perubahan-perubahan di Eropa berpengaruh pula pada kegiatan di Tanah Air. Sewaktu Bangsa Belanda dan Portugis dikalahkan Inggeris, Kepulauan Nusantara dijajah Inggeris. Tetapi setelah Inggeris mengundurkan diri, Bangsa Belanda dan Portugis kembali menjajah Tanah Air.

Hubungan baik Belanda dan Portugis masih tetap dipertahankan. Tetapi berhubung Belanda pada tahun 1854 merasa kian kuat kedudukannya, Belanda mengajukan perjanjian mengenai perbatasan dengan Portugis. Perjanjian baru ini ditandatangani pada tahun 1859 setelah lima tahun berlarut-larut. Dalam perundingan itu ditetapkan, Pulau Flores dan Kepulauan Solor diserahkan kepada Belanda dengan imbalan 80.000 Florins. Daerah yang masih tetap dibawah pengawasan Portugis adalah bagian Timur Pulau Timor, Enklave Oekusi, Pulau Atauro dan Pulau Jaco.

Tahun 1821 M, Kerajaan Portugis menjadi lebih liberal dengan dihapuskannya Monarchi Absolut, berakibat Timor Timur menjadi propinsi penuh. Sementara itu raja-raja pribumi terus menerus mengadakan perlawanan, bahkan pernah seorang Gubernur Jenderal Portugis terbunuh. Pada tahun 1894 s/d 1940, Gubernur Celestino da Silva menumpas perlawanan raja-raja sehingga kedudukan penjajahan Portugis bisa dipertahankan.

Due to pressure from various parties, the Portuguese then chose Solor at the Lesser Sunda Isles (now East Nusa Tenggara), making it a trading port and centre for preaching the Gospel. The first fortress as Solor (1566) was built by Dominican Order with the aim of protecting Christian villages, later known as Tupas. As a result from pressure by the Dutch, the centre or Portuguese activities was moved to Latantuka (1613). Permanent settlemet in Timor was established by Padre Michael Rangel (1613) at Silabau (west of Atapupu). Since then the Portuguese in Timor began to be firmly established bu preaching.

At that time, the community was already familiar with the kingdom located at Wehale. Since their presence, the Portuguese always met resistance from the community and king of Timor.

Unfortunately, cohesion and unity at that time were very fragile. The king of Wehale, on one hand, felt rivalry from the Portuguese, while on the other hand, kings as subordinates of Wehale would like to separate from the Wehale unity. Through friendship treaties with the subordinates of Wehale, the Portuguese succeeded in dominating Timor. According to Schule Nordholt, this took place in 1642. The Portuguese troops were assisted by Tupas forces (Black Portuguese). Since then, only the same that was left of the unitary kingdom of Wehale.

The origin of the Tupas community was mixed marriages which took place between the peoples from India, Africa and Southeast Asia with the native population. Always wearing a hat is the typical feature of this community. Tupas has played an important role in the history of the island of Flores and Timor.

Due to continued advantage and success in defeating the portuguese in several areas of the Arcgipelago, the Dutch became firmly determined to oust the Portuguese from this whole territory. A Dutch effort in 1660 failed to dislodge the Portuguese from Larantuka. The Portuguese position became stronger and in 1662, they even concluded a peace treaty with the Dutch.

In 1681, the island of Timor and Solor officially became part of the Portuguese Kingdom. But the native kingdom and the people continued their resistance to oust the colonisers. The native kings, in their efforts of maintaining sovereignty, sometimes carried out a policy pitting the Dutch againts the Portuguese. In 1705, the Portuguese rulers established Lifau near Oekusi as their capital. For almost three years, this city was encircled by Tupas, but the Portuguese could hold out due to continued assistance from certain native kings.

*The object of attacks by the Topas was not only the Portuguese, but the Dutch as well at Kupang. In 1749, a major attack took place known as the **Penfui War.** The Tupas threw in 50.000 troops to attack the Dutch positions. A new attack was carried out in 1752, but failed. In 1756, the Dutch sent the **Pravisina** mission to conclude treaties with native kings and as a result, the authority of Tupas was pushed back to the eastern part of Timor.*

Not all kings agreed to be colonized. In 1779, the King of Luca put a fight againts the Portuguese. His resistance spread and dragged on, followed by the other kings.

The turbulences and changes in Europe also influenced activities in our home country. When the British defeated the Dutch and Portuguese, they ruled over the Archipelago. But, after the British retreated, the Dutch and Portuguese again ruled our country.

The good relationship between the Dutch and the Portuguese was still maintained. But in 1854, when the Dutch realized that their position kept improving, they submitted a border agreement with the Portuguese. This new agreement was signed in 1859, after five years of prolonged negotiations. It was agreed that the island of Flores and the islands of Solor shall be transferred to the Dutch against a compensation of 80.000 Florins. Remaining under Portuguese rule shall be the eastern part of Timor island, Oekusi enclave, Atauro island and Jaco island.

In 1821, the Portuguese Kingdom became more liberal with the abolishment of absolute monarchy and as such East Timor became a fullfledged province. Meanwhile, the native kings continued with their resistance and once killed a Portuguese Governor General. From 1894 up to 1940, Governor Celestino da Silva crushed the resistance of the kings in order to maintain Portuguese colonial rule.

The border problem remained between the Dutch and the Portuguese. Therefore, an agreement was renewed in 1983, followed by mapping and the establishment of a committee which took place in 1898. The result of this mapping was put into a new agreement in the Hague on 1 October 1904. It was approved in 1914 and ratification was not until 1917. The territorial boundaries as a result of this agreement shall be as reflected in the map of East Nusa Tenggara (NTT) and East Timor.

In order to stop resistance of the native kings, at the suggestion of Filomena da Camara, the Portuguese Government concluded a treaty and blood oath with the kings. It is expected that in this way wars could be stopped. Between 1911 - 1913, the resistance by the kings was negligible. But in 1959, there was attempt of a small revolt, known as the revolt of Uatu Garau (buffalo stone).

Masalah perbatasan antara Belanda dan Portugis masih tetap saja **ada. Oleh karena** itu pada tahun 1895 diadakan perjanjian ulang, **diteruskan dengan** tindak lanjut melaksanakan pemetaan serta membentuk panitia yang dilaksanakan pada tahun 1898 M. Hasil pengukuran ini dituangkan dalam perjanjian baru di Den Haag, yaitu tanggal 1 Oktober 1904 M. Ratifikasi dilaksanakan pada tahun 1914 sedang pengesahannya baru terjadi pada tahun 1917 M. Batas-batas wilayah hasil perjanjian Den Haag ini adalah batas seperti yang tercermin dalam peta NTT dan Timor Timur.

Untuk menghentikan perlawanan raja-raja pribumi, atas saran Filomena da Camara, Pemerintahan Portugis mengadakan perjanjian dan sumpah darah dengan raja-raja. Diduga denga cara ini peperangan dapat dihentikan. Pada tahun 1911 - 1913 M, perlawanan-perlawanan raja kurang berarti. Tetapi pada tahun 1959, ada usaha pemberontakan kecil yang dikenal dengan pemberontakan Uatu Garau (batu kerbau).

a. Kepangkuan Ibu Pertiwi

Pada tahun 1971, otonomi daerah Timor Timur disyahkan oleh Pemerintah dan Parlemen Portugis. Sejak saat itu pula Propinsi Timur Timur menjadi otonom penuh. Pada tahun 1974, di Portugal terjadi **Revolusi Bunga** yang mengangkat Jenderal Spinola ke jenjang kekuasaan. Dewan Revolusi merencanakan "Dekolonisasi" yang disambut baik oleh rakyat negara-negara jajahan. Sehubungan dengan tidak tegasnya Pemerintah Portugis dalam proses penyerahan kekuasaan dan kedaulatan, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah jajahannya, yang mengakibatkan labilnya keadaan serta menimbulkan korban harta benda yang tiada ternilai.

Peristiwa itu merembet pula ke Timor Timur koloni Portugis paling Timur. Di wilayah ini lahir tiga kekuatan politik utama yang mempunyai aspirasi yang berbeda. Golongan pertama **Apodeti** yang menghendaki penggabungan dengan Indonesia, karena mempunyai alasan etnis dan historis. Golongan kedua **UDT** yang menginginkan merdeka di bawah payung Portugis dan ketiga **Fretilin** yang menghendaki merdeka penuh bebas dari siapapun.

Pada tanggal 28 Nopember 1975, Fretilin secara sepihak dan melalui kekerasan memproklamirkan "Republik Demokrasi Timor Timur". Sebagai tandingan partai-partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalistha mengadakan deklarasi dan sepakat mencetuskan "Proklamasi Balibo" pada tanggal 30 Nopember 1975. Deklarasi itu memuat pernyataan: Penyatuan Seluruh Bekas Koloni Portugis di Timor Timur dengan Republik Indonesia. Sejalan dengan Proklamasi Balibo, kemudian Dili direbut pada tanggal 17 Desember 1975. Yang disusul oleh pembentukan Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) dengan ibukota Dili. Sebagai Pimpinan Eksekutif ditunjuk **Arnaldo Dos Reis Arau Jo.** Sedang Dewan Perwakilan Rakyat diketuai oleh **Guilherme Maria Goncalves** dengan wakilnya **Gaspar Correia Da Silva Nunes.**

Sidang DPR Timor Timur pada tanggal 31 Mei 1976, mengeluarkan petisi yang mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerima dan mensahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya integrasi rakyat di wilayah Timor Timur secara keseluruhan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa referendum. Pada tanggal 7 Juni 1976, untuk rakyat Timor Timur, yang terdiri dari 51 orang dan dipimpin oleh Ketua Eksekutif Pemerintah Sementara Timor Timur, Arnaldo Dos Reis Araujo, menyampaikan petisi rakyat Timor Timur itu kepada Presiden Soeharto, yang menyatakan antara lain, bahwa : "... sebelum pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlangsung secara resmi, ijinkanlah Saudara Ketua Eksekutif Pemerintahan Sementara Timor Timur, Pemerintah Republik Indonesia terlebih dahulu mengajak rakyat Indonesia sekali lagi menyaksikan kemauan rakyat Timor Timur".

Pada tanggal 24 Juni 1976, Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi Pemerintah Pusat dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud. Delegasi ini mengikutsertakan wakil-wakil negara asing, wartawan dalam dan luar negeri. Delegasi mengunjungi Dili, Viqueque, Ermera, Balibo dan Oekusi.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud ke Timor Timur, dalam Sidang Kabinet tanggal 29 Juli 1976 telah dibahas berbagai masalah praktis, yuridis, maupun sosial ekonomis sehubungan dengan **Petisi** Rakyat Timor Timur yang menginginkan Wilayah Timor Timur mengintegrasikan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1976, pemerintah mengajukan Rencana Undang-Undang ke DPR-RI tentang : Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Sidang Pleno DPR-RI tangal 15 Juli 1976 yang dihadiri pula oleh tokoh-tokoh Pemerintahan Sementara Timor Timur, Dewan Perwakilan Rakyat RI secara aklamasi menyetujui Rencana Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang. Akhirnya Presiden mengesahkan dan menandatangani Undang-Undang No 7 tahun 1976, tentang Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus

a. Rejoining the Motherland

In 1971, the autonomy of the East Timor area was legalized by the Portuguese Government and Parliament. As such, since that moment the Province of East Timor became a full autonomous region. In 1974, a ***Flower Revolution*** *took place in Portugal, bringing General Spinola to power. The Revolutionary Council planned "Decolonization" which was welcomed by people in the colonized states. But lack of firmness on the part of the Portuguese Government in the process of transferring power and sovereignty led to disturbances in its colonies, creating instability as well as invaluable loss in property.*

The events also spread to East Timor, Portugal's most eastern colony. In this region emerged three main political forces, each with a different aspiration. The first group, Apodeti, preferred integration with Indonesia due to ethnical and historical reasons. The second group, UDT, desired independence under Portuguese protection and the third, Fretilin wanted full independence.

On 28 November 1975, Fretilin proclaimed unilaterally and by force, "the Democratic Republic of East Timor". As a counteract, the parties APODETI, UDT, KOTA and Trabalistha reached an agreement on 30 November 1975 and issued the ***"Balibo Proclamation".*** *In the declaration was expressed: the integration of the entire Portuguese colony in East Timor with the Republic of Indonesia. In line with the Balibo Proclamation, Dili was then captured on 17 December 1975. This was followed by forming the Provisional Government of East Timor* ***(PSTT)*** *with Dili as capital. As Head of the Executive was appointed* ***Arnaldo Dos Reis Araujo.*** *While the House of Representatives was chaired by* ***Guilherme Maria Goncalves*** *and as deputy,* ***Gaspar Correia Da Silva Nunes.***

In its session on 31 May 1976, the House of Representatives of East Timor issued a petition containing an urgent request to the Government of Indonesia to accept and legalize, in the shortest possible time, the integration of the people and territory of East Timor with the Unitary State of the Republic of Indonesia without refendum. On 7 June 1976, on behalf of the people of East Timor, 51 persons led by the Chief Executive of East Timor's Provisional Government, Arnaldo Dos Reis Araujo, submitted the petition to President Soeharto. It was stated among other: "... ***to allow the Chief Executive of East Timor's Provisional Government requesting the Government of the Republic of Indonesia, that prior to official integration with the Unitary State of the Republic of Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia first invite the people of Indonesia to witness once again the will of the people of East Timor".***

On 4 June 1976, the Government of the Republic of Indonesia sent a delegation consisting of high officials of the Central Government led by the Minister of Home Affairs, Amir Machmud. Included in the delegation were representatives of foreign countries, the domestic as well as foreign press. They visited Dili, Viqueque, Ermera, Balibo and Oekusi.

As a follow-up of Minister Amir Mahmud's visit to East Timor, the Cabinet in its session on 29 June 1976, discussed various practical problems, legal as well as socio-economic in connection with the petition of the East Timor people wishing to integrate East Timor's territory with the Unitary State of the Republic of Indonesia. On 5 July 1976, the government submitted a Draft Law to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR—RI) regarding: the unification of East Timor with the Unitary State of the Republic of Indonesia. In its plenary session on 15 july 1976, also attended by leaders of East Timor's Provisional Government, the House of Representatives of the Republic of Indonesia, by acclamation approved the Draft Law to be made into Law. And finalty, it was signed by the President and enacted as Law No 7 of 1976 concerning the Integration of East Timor with the Unitary State of the Republic of Indonesia and at the same time Establishing the Province of East Timor. In addition, the President approved and issued Presidential Decree No 92/M/1976 and No 93/M/1976 regarding the appointment of Arnaldo Dos Reis Araujo as Governor of East Timor Province, and Francisco Lopes Da Cruz as Deputy Governor.

Law No 7 of 1976 was then endorsed by Decree of the People's Consultative Assembly, TAP MPR No IV/MPR/1978 dated 22 March 1978. With regard to the apparatus of the Provincial Government of East Timor and its districts, the provisions are based on Government Regulation No 19 of 1976, which among other include: the Position/Status of the Provincial Government of East Timor. The division of the Territory of the Province of East Timor into Districts with their respective capitals. The division of district area into sub-districs. Establishing the base for authority. Establishing the Provincial Government policy which is supported by the State Budget.

Based on the above it means that in principle, Law No 5 of 1976 concerning the Fundamentals of Public Administration in the Region has been implemented in East Timor Province. As a result of difference in the system and objective of administration between the Portuguese Government and the Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia, there are definitely many problems in various sectors, especially in the field of public administration requiring speedy solution.

With the formal establishment of the Province of East Timor as the 27th Province of the Unitary State of the Republic of Indonesia, all laws and regula-

Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor TImur. Disamping itu Presiden mengesahkan Surat Keputusan Presiden No 92/M/1976 dan 93/M/1976, tentang Pengangkatan Arnaldo Dos Reis Araujo sebagai Gubernur Propinsi Timor Timur dan Fransisco Lopes Da Cruz sebagai Wakil Gubernur.

Undang-Undang No 7 tahun 1976 kemudian dikukuhkan melalui Tap MPR VI/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978. Pengaturan perangkat Pemerintah Daerah Propinsi Timor Timur dan kabupaten-kabupatennya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1976, yang antara lain mengatur tentang : Kedudukan/stasus Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur. Pembagian wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur ke dalam kabupaten-kabupaten dengan ibukotanya masing-masing. Pembagian wilayah kabupaten ke dalam kecamatan-kecamatan. Penetapan kewenangan pangkal. Penentuan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, berarti bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah secara prinsipil telah dilaksanakan di Propinsi Timor Timur. Sebagai akibat dari sistem dan tujuan pemerintahan yang berbeda antara pemerintahan Portugis dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah barang tentu banyak permasalahan di berbagai sektor, khususnya di bidang pemerintahan yang perlu segera diselesaikan.

Dengan dibentuknya dan disahkannya Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai Propinsi yang ke 27 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di propinsi lainnya berlaku pula di Propinsi Timor Timur dengan memperhitungkan keadaan, situasi dan kondisi setempat.

Pada mulanya, kekhususan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 209 Tahun 1976 jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur No 01 tahun 1976. Didalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur No 01 tahun 1976 tersebut dinyatakan bahwa Sekretariat Wilayah Daeah Tingkat I Timor Timur dibagi atas 5 biro, yaitu : Biro Pemerintahan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perekonomian dan Pembangunan, Biro Umum, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 186 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Timor Timur. Tapi belum sempat Surat Keputusan tersebut dilaksanakan, ternyata telah dikeluarkan lagi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Timor Timur. Untuk melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 1981 tersebut telah pula dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur No 237 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 1981. Dengan Keputusan tersebut, Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Timor Timur dipimpin oleh Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I yang dibantu oleh 3 orang Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I dan Biro yang terdiri dari :

Asisten I Sekwilda membawahi 4 biro, yakni :
Biro Pemerintahan Desa, Biro Hukum dan Biro Humas serta Protokol.
Asisten II Sekwilda membawahi 3 Biro, yakni :
Biro Perekonomian, Biro Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
Asisten III Sekwilda membawahi 4 Biro, yakni :
Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perbekalan dan Biro Umum.

Secara umum pengembangan unit organisasi tersebut baik dan memadai. Namun beberapa masalah perlu mendapat perhatian penyediaan personil yang memenuhi persyaratan untuk ditempatkan pada formasi jabatan pimpinan. Pengisian forma kepegawaian eselon bawahan dengan pertimbangan kemampuan mengemban tugas dan tanggung jawab. Penyediaan fasilitas dan pembiayaan, Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi pola organisasi.
Pengolahan administrasi kepegawaian yang baik dan sistematis serta pembentukan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Nomor : 07 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Timor Timur, maka Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Timor Timur dikembangkan lagi menjadi 3 Assisten dan 14 Biro yang terdiri dari :

- Assisten I Sekwilda membawahi 4 Biro yakni : Biro Pemerintahan, Biro Pemerintahan Desa, Biro Hukum dan Biro Hubungan Masyarakat.
- Assisten II Sekwilda membawahi 5 Biro yakni : Biro Bina Pembangunan, Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah, Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah, Biro Bina Sosial dan Mental Spiritual, Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

tions prevailing in order provinces are also effective in the Province of East Timor, talking into consideration the local condition and situation.

Initially, the specific character of the Province of East Timor was the system of organization and operation of Provincial Secretary ***(Sekwilda)****, provided by Decision of the Minister of Home Affairs No 209 of 1976 jo Decision of the Governor of East Timor Province No 01 of 1976. Decision No 01 of 1976 of the East Timor Governor stated that the Provincial Secretariat of East Timor shall consist of five Bureaus, i.e. : Bureau of Public Administration, Bureau of Finance, Bureau of Personel, Bureau of Economic Affairs and Development, Bureau of General Affairs, based on the Decision of the Minister of Home Affairs No 186 of 1980 concerning the Organization and Operation of the Secretariat of East Timor's Province. But, prior to implementing that Ministerial Decision, the Minister of Home Affairs issued a new Decision No 67 of 1981 concerning the Organization and Operation o the Secretariat of East Timor's Province. In order to implement Ministerial Decision No 67 of 1981, the Governor of East Timor Province also issued Decision No 237 of 1982 regarding the Implementation of Ministerial Decision No 67 of 1981. With the Decision, the Secretariat of the Province of East Timor shall be headed by a* ***Sekwilda*** *who will be assisted by three Assistant* ***Sekwilda*** *and 11 Bureaus consisting of :*
Ist Assistant ***Sekwilda*** *will supervise four bureau, i.e. Bureau of Public Administration, Bureau of Rural Administration, Bureau of Legal Affairs, Bureau of Public Relations and Protocol.*
IInd Assistant ***Sekwilda*** *will supervise three Bureaus, i.e.: Bureau of Economic Affairs, Bureau of Development, Bureau of People's Welfare.*
IIIrd Assistant ***Sekwilda*** *will supervisi four Bureau, i.e. : Bureau of Finance, Bureau of Personnel, Bureau of Supply and Bureau of General Affairs.*

In general, the development of such organizational unit proceeded well and satisfactory. Nevertheless, several problems required further attention, such as providing qualified personnel to assume management functions. Filling personnel formation of the lower echelon by considering ability to perform task and responsibility. The provision of facilities and financing. Providing facilities and infrastructure for office in accordance with organizational pattern
A good and systematic personnel administration as well as assisting regional apparatus.

Based on Regional Regulation of East Timor Province No 07 of 1985 regarding the Organization and Operation of the Secretariat of East Timor's ***DPRD TK. I*** *(Provincial House of Representatives), East Timor's Provincial Secretariat is further developed into three Assistants and 14 Bureau, consisting of :*

- *Ist Assistant* ***Sekwilda*** *will supervisi four Bureaus, i.e.: Bureau of Public Administration, Bureau of Rural Administration, Bureau of Legal Affairs and Bureau of Public Relations.*
- *IInd Assistant* ***Sekwilda*** *will supervise five Bureaus, i.e: Bureau to guide development, Bureau to guide development of regional production, Biro to guide development of regional economic facilities, Bureau for Social and Mental-Spiritual guidance and Bureau to guide population and the environment.*
- *IIIrd Assistant* ***Sekwilda*** *will supervise five Bureau, i.e.: Bureau of Organization and management, Bureau of Personnel, Bureau of Finance, Bureau of Material and Maintenance, and Bureau of General Affairs.*

Based on the Decree of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No 821.25 - 529, dated 14 May 1986 concerning the establishment of Operational region ***(Wilayah Kerja)*** *of an Assistant Governor in East Timor Province, respectively* ***Wilayah I, Wilayah II*** *and* ***Wilayah III.***

- ***Wilayah I*** *covering:* ***Kabupaten Daerah Tingkat II****/the District of Lautem, the District of Baucau, the District of Viqueque and District of Manatuto. The head office shall be in Baucau.*
- ***Wilayah II*** *covering: the District of Dili, the District of Liquisa, the District of Ermera, the District of Aileu and the District of Manufahi. The head office shall be in Ermera.*
- ***Wilayah II*** *covering: the District of Bobonaro, the Disctrict of Covalima, the District of Ainaro, the District of Ambeno. The head office shall be in Maliana.*

In accordance with the Decision of the Minister of Home Affairs No 68 of 1981, a District Secretariat ***(Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II)*** *and a District House a Representative's Secretariat* ***(Sekretariat DPRD Tingkat II)*** *were established. The Decision stated that the District Secretariat shall supervisi five sections, i.e. Public Administration Section, Finance Section, Personnel Section, Economic & Development Section and General Affairs Section. With regard to Sub-district public Administration, its establishment is based on the Decision of the Minister of Home Affairs No 41 of 1981. The organization of public administration for the 61 Subdistricts was based on Government Regulation No 19 of 1976.*

Based on Government Regulation No 41 of 1981, was established the Municipal Administration for Dili headed by a Mayor. The Dili Municipal Administration Area consists of two ***Kecamatan*** *(Subdistrict), namely Dili Barat (West) and Dili Timur (East) with 26 villages.*

- Assisten III Sekwilda membawahi 5 Biro yakni : Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan dan Perawatan dan Biro Umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.25 - 529 tanggal 14 Mei 1986 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu di Propinsi Timor Timur masing-masing Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.

- Wilayah I meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Lautem, Kabupaten Daerah Tingkat II Baucau, Kabupaten Daerah Tingkat II Viqueque dan Kabupaten Daerah Tingkat II Manatuto. Pusat Kedudukannya berada di Baucau.
- Wilayah II meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Dili, Kabupaten Daerah Tingkat II Liquisa, Kabupaten Daerah Tingkat II Ermera, Kabupaten Daerah Tingkat II Aileu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Manufahi. Pusat kedudukannya berada di Ermera.
- Wilayah III meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Bobonaro, Kabupaten Daerah Tingkat II Covalima, Kabupaten Daerah Tingkat II Ainaro, Kabupaten Daerah Tingkat II Ambeno. Pusat kedudukannya berada di Maliana.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No 68 tahun 1981 dibentuklah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II dan Sekretariat DPRD Tingkat II. Dalam Keputusan tersebut ditetapkan bahwa Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II membawahi 5 Bagian-bagian. Kelima bagian dalam Sekretariat Wilayah Daerah tersebut masing-masing : Bagian Pemerintahan, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Bagian Umum. Adapun pembentukan Pemerintahan Wilayah Kecamatan didasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 1981 dibentuk Susunan Organisasi pemerintah wilayah kecamatan bagi 61 kecamatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan bagi 61 kecamatan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1976. Dengan Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1981 telah dibentuk Pemerintah Wilayah Kota Administratif Dili yang dikepalai seorang Walikota. Wilayah Kota Administratif Dili meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Dili Barat dan Kecamatan Dili Timur, terdiri dari 26 desa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diresmikan pengangkatan dan pelantikan anggota DPRD Tingkat I Timor Timur hasil Pemilu tahun 1982 yang terdiri dari : 32 orang anggota DPRD Tingkat I yang diperoleh dari hasil Pemilu 1982 dan anggota DPRD Tingkat I yang diangkat terdiri dari Golongan Karya ABRI 6 orang Golongan Karya Bukan ABRI 2 orang.

b. Adat Istiadat

Kekerabatan Tetum

Kekerabatan ini menganut sistem kekerabatan. **Patrilineal** dan **Matrilineal.**

Namun kadang-kadang ada yang **parental.** Bentuk kekerabatan :

- Klen adalah bentuk kekerabatan exogam yang terbesar.
- Kleng bangsawan terdiri dari sejumlah satuan kerabat umakain (fratri).
- Setiap uma kain terbagi dalam sejumlah kelompok feto foun dan mane foun. Kekerabatan terkecil adalah rumah tangga atau ema uma laran (ema).
- Sekelompok kerabat ini tinggal di dalam Povoacao atau knua. Secara ideal mereka tinggal mengelompok tetapi kenyataan sering terjadi pertentangan antara klen, fratri maupun lineage (feto uan dan mane uan), sehingga mereka tinggal terpencar.

  Masing-masing kerabat ini mempunyai pimpinan. Pemimpin klen dan fratri :
  - Catuas untuk masalah sekuler.
  - Catuas lulik untuk masalah sakral.

  Pimpinan lineage (kelompok) :
  - bahan mahebu untuk masalah sekuler.
  - bahan mahebu lulik untuk masalah sakral.

  Stratifikasi masyarakat Tetum :
  - Raja dan kerabatnya : **Dassi.**
  - Kaum bangsawan : **Dato.**
  - Orang biasa : **Ema Reino atau ema.**

c. Politik dan Pemerintahan

Satuan yang terbesar adalah kerajaan (Rai atau Reino), dengan rajanya Liurai yang dibantu oleh dua orang penguasa mucair fukun dan dato uain.

Masing-masing penguasa berasal dari klen-klen bangsawan. Kerajaan membawahi kerajaan kecil atau suco (suku), dengan rajanya juga liurai atau reno bila menghadapi raja yang lebih besar atau atasannya. Pimpinan suku dapat juga dipilih dan disahkan oleh pemerintah Portugis

b. Customs and Traditions

Tetum Family Relationship

This family relationship maintains two systems: Patrilineal and Matrilineal, but sometimes parental.

Family relationship structure:

- *Clan is the biggest exogamic family relationship.*
- *Noble clan, consisting of a number of **uma kain** (fratri) famili unit.*
- *Each **uma kain** is divided into a number of lineage, **feto foun** and **mane foun.** The smallest family relationship is the household, called **ema uma laran (ema).***
- *A group of this family lives in Povoacau of knua. Ideally, they should live in groups, but due to frequent conflicts among clans, fratri as well as lineage (feto uan and mane uan), they are dispersed.*

  Each family unit has a leader/head.

  For clan and fatri, the leader is called:
- ***Catuas** for secular problems*
- ***Catuas ulik** for sacral problems.*

  The head of a lineage is called :
- ***bahen mahebu** for secular problems.*
- ***bahen mahebu lulik** for sacral problems.*

  In the Tetum community, we have the following stratum:
- *King and his relatives : **Dassi***
- *the Nobility : **Dato***
- *the common people : **Ema Reino** or **ema***

c. Politics and Public Administration

*The biggest unit is the kingdom **(Rai** or **Reino),** with the **Liurai** as king who is assisted by two authorities, **mucair fukun** and **dato uain.***

*Each assistant comes from the noble clan. The kingdom rules over smaller kingdoms or **suco (suku),** also with liurai as king or reino when faced with a bigger king or superior. The leadership of the suku can also be elected and legalized by the Portuguese Government with a position called **chefe de suku.** Unlike the **mucair fukun** and **dato uain** who are descendants from kings/nobility.*

*Those active in the administration/executive are **mucair fukun, dato uain** and **chefe de suco,** while liurai is only a symbol. In addition, each kingdom has religious leader, **mucair lulik,** his position being at the same level as mucair fukun and dato uain. After the revolt of the kings (1912—1914), the liurai still existed but without any authority.*

Housing :

***Uma cnua** is the house used as living quarters throughout the year. **Uma to'os** is built in the farmland, used as temporary quarters while working in the field. While **uma boot** is a meeting place and can be found in each lineage group.*

Marriage :

There are four types of marriages or weddings :

- ***Hafoli :** there is an equal status between the family of the bride and that of the bridegroom. The dowary is usually moderate.*
- ***Habanin :** after the wedding ceremony is over, the husband will remain at the house of the bride's family and has various obligations to his in-laws. This is due to postponement of dowry payment by the husband, during which period the system of matrilineal is effective. The change into patrilineal will take place after the husband has paid the dowry.*
- ***Petosa Umane :** now a rare occasion, the party presenting the bride is called **feto oan.** In principle, this marriage covers a number of lineage which was earlier bound in matrimonial relationship of an asymmetrical character. Marriage is here usually based on practical reasons.*
- ***Hafen :** marriage on the basis of mutual agreement between male and female concerned, without dowry and without binding relationship between lineage of both male and female (In Java knows as **kawin kebo** or **gandaan,** in the Minahasa called **kawin baku piaraan).** In this case, marriage between member of one clan is not allowed. Marriage is only possible at **hafoli** and **habanian** weddings, but not allowed in **fetosa umane.***

  Inheritance in the shape of property will be given to the eldest son, sacral position to the youngest son, and the balance to the other sons.

  Inheritance of jewelry will be given to daughters, usually at the time if marriage.

Legal Affairs

Prior to integration, Portuguese law prevailed, i.e. continental law. Portuguese law applied to the Portuguese, the natives (Indigeno) and foreigners (Estrangiero).

*For natives residing outside the cities, the customary or **adat** law is applied through intermediary of the **suku/adat** head. If the customary law cannot bring settlement, then the Portuguese law is applied. The head of a sub-*

dengan kedudukan chefe de suku. Berbeda dengan mucair fukun dan dato uain yang berasal dari keturunan raja/bangsawan. Yang aktif dalam pemerintahan/eksekutif adalah mucair fukun, dato uain dan chefe de suco, sedang liurai hanya secara simbolik saja. Disamping itu setiap kerajaan mempunyai tokoh agama mucair lulik, yang kedudukannya setingkat dengan mucair fukun dan dato usin. Setelah terjadi . »erontakan raja-raja (1912-1914) liurai masih ada, akan tetapi tidak mempunyai kekuasaan lagi.

Rumah :

Uma enua adalah rumah tinggal ditempati sepanjang tahun. Uma to'os dibangun di ladang untuk didiami sementara dan berladang disitu. Sedang uma boot rumah untuk tempat rapat terdapat di setiap kelompok kerabat.

Perkawinan :

Dikenal ada 4 macam perkawinan :
- **Hafoli :** status kerabat pengantin wanita dan pengantin pria seimbang. Biasanya mas kawin sedang.
- **Habanin :** setelah selesai upacara perkawinan suami tinggal di tempat keluarga isteri dan mempunyai berbagai macam kewajiban terhadap mertua. Hal ini karena penundaan pembayaran mas kawin yang seharusnya dibayar oleh suami. Sementara menganut sistem matrialineal, setelah mas kawin dibayar beralih ke patrinial.
- **Petosa Umane :** Sudah jarang dilakukan, pihak pemberi wanita disebut feto oan. Pada prinsipnya perkawinan ini mencakup sejumlah lineage yang sebelumnya telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan yang sifatnya **asimetrik.** Di sini biasanya atas dasar alasan-alasan praktis.
- **Hafen :** perkawinan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan wanita yang bersangkutan, tanpa mas kawin dan tanpa ada hubungan yang mengikat antara kelompok kerabat laki-laki dan wanita (di Jawa dikenal dengan kawin kebo atau gandaan, di Minahasa kawin baku piaraan). Dalam hal ini perkawinan di antara anggota satu klen tidak diperbolehkan.

Perkawinan hanya mungkin pada perkawinan hafoli dan habanian, tetapi terlarang dalam perkawinan fetosa umane.

Warisan harta benda diberikan kepada anak laki-laki tertua, jabatan sakral kepada anak laki-laki termuda, sisanya untuk anak laki-laki lainnya. Warisan perhiasan diberikan untuk anak perempuan, biasanya pada waktu nikah.

Hukum

Sebelum integrasi berlaku hukum Portugis yaitu **hukum kontinental.** Hukum Portugis berlaku untuk : golongan Portugis, golongan Bumiputra/pribumi (Indigeno) dan golongan orang asing (Estrangeiro).

Bagi penduduk pribumi yang tinggal di luar kota berlaku hukum adat. Hukum adat diselesaikan lewat kepala suku/kepala adat. Bila tidak dapat diselesaikan, diberlakukan hukum Portugis. Camat bertindak sebagai hakim kecamatan atau polisi koreksi. Camat menyusun proses verbal diajukan kepada Bupati, yang akan meneruskan kepada jaksa untuk selanjutnya ke pengadilan.

Adapun susunan pengadilannya :
- Mahkamah Agung, berkedudukan di Lisboa.
- Pengadilan Tinggi, di Mozambique.
- Pengadilan Negeri Timor Timur berkedudukan di Dili.
- Pengadilan di Kabupaten dipegang oleh Bupati atau disebut Administrator.
- Pengadilan di Kecamatan, yang dalam praktek adalah pemeriksaan camat yang bertindak sebagai Hakim.

Susunan Kejaksaan :
- Kejaksaan Agung berkedudukan di Lisboa.
- Kejaksaan Tinggi di Mozambique
- Kejaksaaan Negeri Timor Timur berkedudukan di Dili.
- Pembantu Jaksa di Kabupaten; dilakukan oleh Bupati.
- Pembantu Jaksa di Kecamatan dilakukan oleh Camat.

Setelah perkara diputuskan oleh majelis hakim atau hakim tugngal hukuman dilakukan secara ditahan, tetapi siang harinya dipekerjakan di bawah pengawasan.

Hukum adat tetap dihargai, akan tetapi tidak diakui oleh Hukum Portugis. Tidak seperti halnya hukum adat di Indonesia, ada kecenderungan untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar pembentukan Hukum Nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Timor Timur sebagai wilayah Indonesia, karena itu berlaku hukum Republik Indonesia. Untuk ini perlu penyesuaian penerapannya dan menerapkan pengertian Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat.

district ***(camat)*** *will act as judge of the sub-district of correcting police* ***(polisi koreksi).*** *The* ***Camat*** *will prepare an official report to be sumbitted to the* ***Bupati*** *or District Head who will pass it to the public prosecutor and then to the court.*

The structure of the court is as follows :
- *the Supreme Court, located in Lisboa.*
- *the Appelate Court in Mozambique.*
- *the Court of Justice of East Timor located in Dili.*
- *A Court in a* ***Kabupaten*** *(District) is assumed by the* ***Bupati*** *(District Head) or called the Administration.*
- *A Court in a Sub-district is in practice an interrogation by the Sub-district Head or Camat acting as a judge. Structure of the Prosecution Office :*
- *the Attorney General Office located in Lisboa.*
- *the Higher Prosecution Office in Mozambique*
- *the Public Prosecution Office of East Timor in Dili*
- *the Assistant Prosecutor in a District is performed by the* ***Bupati***
- *the Assistant Prosecutor in a Sub-district is performed by the* ***Camat.***

After verdict of a case by a council of judges or by a single judge, execution of the sentence in by detention, but during daytime will be put to work under supervision.

The adat or customary law shall be respected, but not recognized bo Portuguese law. Unlike the customary law in Indonesia, where there is tendency to use customary law as the basis of composing National Law, in so far it does not contradict the 1945 Constitutation and Pancasila, East Timor is a territory of Indonesia and therefore, the laws of the Republic of Indonesia prevail. This requires adjustment of application and to inform the public about the meaning of applying the laws of the Republic of Indonesia.

Portuguese citizenship is based on ***Ius Soli,*** *it can also be obtained by marriage or naturalization. Foreigners residing in East Timor are given a permit to stay for one year, and where necessary can be extended.*

In the past, landownership only existed as ***'adat land'*** *land which is owned by a* ***suku*** *or clan and under control of an adat head; there is also "adat land" which is personal property. Beyond that the land has the status of irregular land. After the Portuguese period, this irregular land is controlled and with the status: right of propriety (ownership), right of lease, right of use. Generally, these lands are provided with a certificate.*

Traditional House :

There are several types of traditional houses or ***uma lulik :***

- *Uma lulik Tuna/Belut can be found in Kailoli, Dili. Children until reaching adulthood are not subject to procedure and rules of the traditional house.*
- *Uma lulik Marobo at Bobonaro. Uma lulik can give magic powers to people of the traditional house. The blessing of their ancestors give spiritual encouragement when going to war.*
- *Uma lulik Manehat at Bonobaro. To keep and assemble adat/legacy items left behind by the ancestors and considered to be invaluable and respected items.*
- *Uma lulik Uma Dato at Manufahe/Same. Prior to carrying out something, blessing should be asked from this Uma lulik and offer sacrifices in the form of pig, buffalo, goat, chicken, etc. The animals to be sacrificed should be red. When the offerings are consumed, they shall be put on a basket tray and so spoon shall be used.*
- *Uma lulik Flug Ilu at Ainaro, A place to keep rice and corn harvest. Prior to consuming, the crop shall first be kept is this traditional house.*
- *Uma lulik Fatuk Hun at Viqueque. Prior to going to school or to war, descendants from this traditional house shall ask the blessing of their ancestors.*
- *Uma lulik Lautem at Lospalos. To keep adat and legacy items from ancestors. During harvest time, the first act will be to put the crop (rice/corn) into this house. A model of this traditional house can be found at Taman Mini, Dili, East Timor.*

Coat of Arms of the Region

The Coat of Arms of East Timor is shield with five corners (pentagonal) against a yellow background, and has the following meaning:

- *the shield has five corners symbolising the five principles of Pancasila, the basis and philosophy of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The shield symbolizes the safety of territorial integrity and potential of the people of East Timor Province as an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Kewarganegaraan Portugis didasarkan atas Ius Soli, dapat juga diperoleh karena perkawinan atau naturalisasi. Bagi orang asing yang ingin tinggal di Timor Timur diberikan izin tinggal selama setahun. Bilamana perlu dapat diperpanjang.

Kepemilikan tanah dulu, hanya dikenal tanah adat. Yaitu tanah yang dimiliki oleh suku atau klen dan dikuasai oleh kepala adat, ada juga tanah adat milik perorangan. Di luar itu tanah yang berstatus tanah liar. Setelah jaman Portugis, tanah liar ini dikuasai dan berstatus sebagai : Tanah hak millik, tanah sewa dan tanah hak pakai. Pada umumnya tanah-tanah ini diberi sertifikat.

Rumah Adat

Rumah adat atau uma lulik dikenal ada beberapa macam :

- Uma lulik Tuna/Belut, terdapat di Kailoli, Dili. Anak-anak yang belum dewasa, belum mempunyai tanggung jawab terhadap tata carr dan peraturan rumah adat.
- Uma lulik Marobo di Bobonaro. Uma lulik dapat memberikan kekuatan gaib kepada orang-orang dari rumah adat yang bersangkutan. Doa restu dari nenek moyang mereka memberikan semangat kejiwaan pada waktu pergi berperang.
- Uma lulik Manehat di Bobonaro. Untuk menyimpan dan mengumpulkan barang adat/warisan yang ditinggalkan nenek moyang, yang dianggap sebagai barang bernilai dan dihormati.
- Uma lulik Uma Dato di Manufahi/Same. Sebelum mengerjakan sesuatu harus minta doa restu dari Uma lulik ini dan setelah itu mengadakan korban dengan membawa babi, kerbau, kambing, ayam dan lain-lain. Binatang yang dikorbankan harus berwarna merah. Pada waktu makan sesajian korban ini harus ditaruh di niru dan tidak boleh menggunakan sendok.
- Uma lulik Flug Ilu di Ainaro. Tempat menyimpan hasil panenan padi dan jagung. Sebelum panen dimakan, panen tersebut harus disimpan di rumah adat ini.
- Uma lulik Fatuk Hun di Viqueque. Anak cucu dari rumah adat ini sebelum bersekolah atau berperang, mohon doa restu kepada nenek moyang di rumah ini.
- Uma lulik Lauten di Lospalos. Untuk menyimpan barang adat dan warisan dari nenek moyang. Pada waktu panen, pertama-tama harus memasukkan panenan (padi/jagung) ke dalam rumah ini. Contoh rumah adat ini ada di Taman Mini, Dili, Timor Timur.

Lambang Daerah

Lambang propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berbentuk Perisai bersudut lima terlukis di atas warna dasar kuning mempunyai makna sebagai berikut :

— Bentuk Perisai bersudut lima melambangkan kelima sila dari Pancasila, yaitu dasar dan falsafah hidup bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perisai melambangkan keamanan terhadap keutuhan wilayah dan kekuatan rakyat Timor Timur sebagai yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

— Tata warna lambang terdiri atas warna merah, kuning, putih, biru, hitam dan hijau, masing-masing mempunyai makna; merah berarti keberanian, kuning berarti keluhuran, keagungan, kemuliaan dan kejayaan, putih berarti kesucian dan kejujuran, biru berarti kedamaian, kesetiaan, hitam berarti keabadian, keteguhan; selanjutnya hijau berarti kemakmuran.

— Bintang bersudut lima terletak paling atas berwarna kuning terlukis di atas warna dasar biru melambangkan keagungan, kebesaran dan keabadian Tuhan Yang Maha Esa. Di bawah bintang terdapat kalimat dalam bahasa daerah terlukis di atas warna dasar merah dengan huruf latin hitam berbunyi : Houri Otas, Houri Wain, Oan Timor Assawa'in, melambangkan jiwa patriot dan semangat juang rakyat Timor Timur dalam mempertahankan Wawasan Nusantara yang dilandasi nilai-nilai 1945 untuk membangun Propinsi Timor Timur guna mencapai kehidupan yang lebih baik.

— Rumah Adat Timor Timur di atas warna dasar biru melambangkan persatuan, persaudaraan, kekerabatan dan kekeluargaan serta keramahtamahan sebagai pola hidup dan dasar ikatan kemasyarakatan yang merupakan nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Timor Timur. Kotak perhiasan dari emas melambangkan kesuburan, kejayaan dan keindahan Timor Timur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepulauan Indonesia lainnya, yang terletak bagaikan zamrud melingkari khatulistiwa menghiasi ibu pertiwi. Kaebuk, Pedang dan Tombak adalah alat-alat perlengkapan kesatria Timor Timur, melambangkan keperwiraan dan kepahlawanan.

— Nama "Timor Timur" dengan huruf latin berwarna merah tertulis di atas Kaebuk, melambangkan ikatan batin antara masyarakat Timor Timur dengan adat istiadat dan kebudayaan. Di bagian tengah lambang, pada sisi kiri dan kanan terdapat setangkai bunga kapas dan setangkai padi melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

- *the colors of the coat of arms are red, yellow, white, blue, black and green, each with the following meaning: red stands for bravery, yellow for grandeur, greatness, esteem and glory; white stands for purity and honesty; blue for peace, loyalty; black for eternity, resoluteness; and green for prosperity.*
- *the yellow pentagonal star on top against a blue background symbolizes grandeur, greatness and eternity of God the Almighty. Below the star is a sentence in local language, in black Roman letters and red background which reads: Houri Otas, Houri Wain, Oan Timor Asswa'in, symbolizing the patriotic zeal and fighting spirit of the East Timor people in defending the Indonesian Archipelagic Concept which is based on the values of 1945 to develop the Province of East Timor in order to achieve a better life.*
- *the traditional house of East Timor on a blue color symbolizes unity, brotherhood, kinship and family spirit as well as friendliness as pattern of life and basic social ties which constitute cultural noble values and custom and tradition of the East Timor society. The golden jewelry box symbolizes fertility, prosperity and beauty of East Timor as an integral part of the Indonesian archipelago, like emeralds girdling the equator, adorning Mother Earth.* ***Kaebuk, Pedang*** *(sword) and* ***Tombak*** *(spear) are weapons of the East Timor warrior, symbolizing chivalry and heroism.*
- *The name "Timor Timur" in red Roman characters painted on the* ***Kaebuk,*** *symbolizes the spiritual ties between the East Timor community with the custom and tradition and culture. In the centre of the coat of arms, on the left and the right side there is a stem of cotton flower and a stem of rice, symbolising prosperity and welfare.*

A stem of rice in golden yellow, totalling 17 grains of rice, on red and white background, symbolizes the date of establishment of East Timor Province. A stem of cotton flower with green sheaths and seven white buds symbolizesthe month of establishment. The jewelry box is engraved with fishes and six proas, the two figures tied together become 76, indicating 1976, the year in which East Timor Province was established.
Picture of East Timor Province Coat of Arms.

c. House of Representatives (DPR)

*In addition to providing apparatus for the administration of East Timor Province, there was also the formation of bodies for people's representatives, such as at the Provincial level, the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (**DPRD Tk I**, the Provincial House of Representatives) of East Timor and the **DPRD Tk II** or the District House of Representatives.*

In the general election of 1982, the extend of community's participation was reflected during the campaign period. Thousands of people attended campaigns conducted by the three contestants, i.e. the Partai Persatuan Pembangunan, PPP, (United Development Party), Golongan Karya (Functional Group) and the partai Demokrasi Indonesia (PDI, Indonesian Democratic Party)

Voting day on 4 May 1982 which was simultaneously for the whole of Indonesia was joined by 311.375 people from East Timor. The community of East Timor is proud for the rights and duties as the other citizens of Indonesia, to live in a state and participated in a event which was unknown during the colonial period.

*Through general elections, each eligible citizen can elect members of bodies for deliberations and people's representation, i.e. the **MRP** (Majelis Permusyawaratan Rakyat, People's Consultative Assembly), the **DPR—RI** (Dewan Perwakilan Rakyat, Parliament), and **DPRD Tingkat I** (Provincial House of Representatives). Later on, this **MPR—RI** shall elect the President and the Vice President of the Republic of Indonesia, and shall approve the Guidelines on State Policy.*

*On 26 June 1982, fourty members of the elected **DPRD Tk I** were installed. In the General Session of the **MPR—RI** in March 1983, East Timor was represented by eight members.*

*They May 1982 general elections in East Timor was only to elect members for representative bodies at the central and provincial level. But, in the coming general elections in May 1987 it was decided, elections will also take place for members of the Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II (**DPR Tk II**, District House of Representatives).*

*The role of the **DPRD Tk I** in the province is quite abvious, in addition to giving approval regarding Draft Budget submitted by the Governor for the Province, it also decides on several regional regulations, such as regulations on the coat of arms of East Timor Province (1982), the establishment of autonomous services, the Basic Development Design for East Timor Province, tac on transfer of title (**BBM**, especially on vehicles). See table I — 2*

Setangkai padi berwarna kuning emas berjumlah 17 butir di atas warna dasar merah putih, melambangkan tanggal terbentuknya Propinsi Timor Timur. Setangkai bunga kapas berkelopak hijau dan berkuncup putih sejumlah 7 buah, di atas warna dasar merah putih melambangkan bulan terbentuknya. Pada kotak perhiasan terukir 7 ekor ikan dan 6 buah perahu dirangkaikan menjadi angka 76, melambangkan tahun terbentuknya Propinsi Timor Timur.

d. DPR

Disamping pengadaan aparatur negara, di Propinsi Timor Timur dibentuk Badan-badan Perwakilan Rakyat yaitu di tingkat propinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD Tingkat I) Timor Timur dan di tingkat kabupaten DPRD Tingkat II.

Pemilihan Umum 1982 yang lalu, besarnya partisipasi masyarakat tercermin dalam masa kampanye. Ribuan rakyat hadir setiap kampanye yang dilakukan ketiga kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pemungutan suara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, 4 Mei 1982 diikuti 311.375 penduduk Timor Timur. Masyarakat Timor Timur bangga akan hak dan kewajiban yang sama dengan warganegara Indonesia lainya dalam hidup bernegara **yang selama masa kolonial** berkuasa hal seperti itu **tidak pernah terjadi.**

Melalui Pemilihan Umum setiap warganegara ikut serta memilih anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yakni MPR-RI, DPR-RI dan DPRD Tingkat I. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Tanggal 26 Juni 1982, dilantik 40 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, yang merupakan hasil pemilihan Umum 4 Mei 1982. Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Maret 1983, ditetapkan 8 anggota majelis merupakan wakil dari Timor Timur.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lalu hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk tingkat pusat dan propinsi. Belum memilih wakil-wakil rakyat untuk tingkat kabupaten. Namun pada pelaksanaan Pemilihan Umum 1987 ditetapkan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Peranan DPRD Tingkat I di propinsi ini cukup menonjol, selain ikut memberikan persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) juga menetapkan beberapa peraturan daerah seperti peraturan daerah tentang lambang daerah Propinsi Timor Timur (1982), pembentukan dinas-dinas otonom, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Timor Timur, Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor. Lihat Tabel I-2 dan I-3.

Tabel / *Table I — 2*

HASIL PEMILIHAN UMUM 1982 PROPINSI TIMOR TIMUR UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT R.I.

RESULT OF GENERAL ELECTIONS 1982, EAST TIMOR PROVINCE FOR HOUSE OF REPRESENTATIVES RI (DPR — RI)

No	KABUPATEN *District*	PPP/United *Development Party*	GOLKAR *Functional Group*	PDI/Indonesian *Democratic Party*
1.	Aileu	—	8.838	1
2.	Ainaro	1	23.108	—
3.	Ambenu	2	19.544	10
4.	Baucau	22	40.115	36
5.	Bobonaro	10	35.060	8
6.	Covalima	—	14.976	—
7.	Dili	575	40.395	907
8.	Ermera	10	30.118	11
9.	Lautem	37	20.484	27
10.	Liquica	2	17.608	—
11.	Manatuto	1	14.310	15
12.	Manufahi	3	15.217	76
13.	Viqueque	10	29.835	3
Jumlah		673	309.608	1.094

Sumber : Humas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Timor Timur

Source : Public Relations, General Elections Committee, East Timor Province.

Tabel / *Table I — 3*

JUMLAH ANGGOTA DPRD PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT FRAKSI TAHUN 1977 — 1984

NUMBER OF MEMBERS OF EAST TIMOR PROVINCIAL HOUSE OF REPRESENTATIVES ACCORDING TO FACTION, 1977 — 1984

TAHUN YEAR	Nama Fraksi/*Name of Faction*					Jumlah *Total*
	PPP/United *Development Party*	Karya Pembangunan *Functional Group*	PDI *Indonesian Democratic Party*	ABRI	Non ABRI *Armed Forces*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1977	—	37	—	—	—	37
1978	—	29	—	—	—	29
1979	—	27	—	—	—	27
1980	—	25	—	—	—	25
1981	—	34	—	—	—	34
1982	—	32	—	—	—	36
1983	—	32	—	6	2	40
1984	—	32	—	6	2	40

Sumber : Kantor DPRD Tingkat I Propinsi Timor Timur

Source : Office of East Timor Provincial House of Representatives

B A B / *CHAPTER II*

PEMBANGUNAN DAERAH / *REGIONAL DEVELOPMENT*

TIMOR TIMUR merupakan bekas wilayah jajahan Portugis selama hampir 500 tahun. Karena itu, sistem administrasi pemerintahannya berbeda dengan sistem administrasi Republik Indonesia. Perbedaan sangat dirasakan karena belum dikuasainya bahasa nasional. Sedangkan peranan bahasa nasional mutlak diperlukan dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan.

Disamping itu tingkat kemampuan aparatur masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai daerah yang baru lepas dari belenggu penjajahan, banyak terjadi kerusakan baik sarana maupun prasarana fisik. Demikian pula keadaan penduduk masih memerlukan bantuan sandang, pangan maupun perumahan yang layak. Selain masalah adat kebiasaan terutama peranan pemuka masyarakat seperti **liurai-liurai** di pedesaan sangat dominan. Faktor geografis Timor Timur dan pengaruh iklimpun terutama dalam musim huajan dapat merusak sarana dan prasarana yang ada.

Dalam kurun waktu 8 tahun sejak tahun 1976 dilaksanakan berbagai proyek pembangunan yang bersumber dari dana Inpres, sektoral dan sumber-sumber pembiayaan lain. Dengan melalui tahap-tahap pelaksanaan pembangunan seperti : tahun 1976/1977 sampai tahun 1977/1978 tahap rehabilitasi; tahun 1978/1979 sampai tahun 1979/1980 tahap konsolidasi; tahun 1980/1981 **sampai** tahun 1981/1982 tahap stabilitasi; tahun 1982/1983 sampai tahun 1983/1984 tahap Pembangunan Jangka

FOR almost 500 years, East Timor was Portuguese colonial territory. Therefore, its system of public administration differs with that of the Republic Indonesia. This difference is extremely felt due to a lack of command of the national language. While the national language has a vital role in running the public administration.

*Furthermore, the level of ability of the apparatus is still far from expected. As a territory that has just freed itself from the shackles of colonialism, there is considerable demage in facilities as well as physical infrastructure. The people still need assistance in clothing, food as well as proper housing. Besides the problem of custom and tradition, the role of leading community figures especially, such as the **liurais** are very dominant. East Timor's geographical factor and influence of the climate, especially in the rainy season can damage existing facilities and infrastructure.*

*In the eight-years period since 1976, various development projects have been implemented, financed by funds such as **Inpres** (Instruction of the President), sectoral and other sources of financing.*

Development efforts undertaken went through several stages, such as:
- *Rehabilitation Stage 1976/1977 — 1977/1978,*
- *Consolidation Stage 1978/1979 — 1979/1980,*
- *Stabilization Stage 1980/1981 — 1981/1982*
- *Short Term Development Stage (2 years) 1982/1983 — 1983/1984, and*
- *Five-year Development Plan 1984/1985 — 1988/1989.*

Pendek Dua Tahun dan dari tahun 1984/1985 sampai tahun 1988/1989 merupakan tahap Pembangunan Lima Tahun.

Mengingat situasi dan kondisi yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan pada tahap konsolidasi, rehabilitasi dan stabilitasi, maka cara pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara **CRASH PROGRAM.** Hal ini karena kekurangan aparatur di setiap instansi vertikal maupun otonom di semua tingkat.

Walaupun permasalahan pembangunan dalam tiga tahun pertama belum terselesaikan, tetapi dalam tahun 1982/1983 sampai tahun 1983/1984 dicoba pelaksanaan pembangunan yang mengikuti pola perencanaan terarah dan terpadu. Dalam dua tahun anggaran itu, ditetapkan target pencapaian pembangunan per sektor. Ini sejalan dengan Pola Pembangunan Dati I Timor Timur tahun 1982/1983 sampai dengan tahun 1983/1984.

Sedangkan Pola pembangunan Jangka Pendek Timor Timur memuat rangkaian kebijaksanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh, terpadu disegala bidang untuk jangka waktu dua tahun terakhir Pelita III. Dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pelaksanaan pembangunan. Titik beratnya adalah peningkatan produksi **Pertanian** dan membuka isolasi daerah. Baik yang bersifat fisik maupun sosial-budaya melalui peningkatan produksi, sarana dan prasarana **Perhubungan,** peningkatan **Pendidikan** dan perbaikan **Kesehatan** masyarakat. Menanamkan **kesadaran bernegara** dan meletakkan landasan kuat untuk pembangunan selanjutnya.

Hasil pembangunan selama ini dapat mewujudkan suatu kondisi yang baik bagi Timor Timur untuk mempersiapkan diri dalam tahapan pembangunan selanjutnya. Pembangunan dalam tahun 1984/1985 berhasil menciptakan Pola Dasar Pembangunan Timor Timur yang berisikan pemecahan permasalahan pembangunan, strategi pembangunan dan prioritas pembangunan. Untuk sektor Pertanian dititikberatkan pada peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Di sektor perhubungan meliputi perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan secara meluas dan merata. Terutama untuk membuka daerah-daerah yang terisolir. Disamping memperlancar arus penumpang, barang dan jasa ke seluruh wilayah propinsi Timor Timur.

Selain itu meningkatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat secara serasi demi terciptanya derajat kesehatan yang memadai bagi seluruh rakyat melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Sementara bidang pendidikan menitikberatkan pada pendidikan dasar untuk memberantas 3 buta (aksara, bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar) dan peningkatan fasilitas belajar dan mengajar. Juga pemenuhan tenaga pengajar, pengembangan sekolah kejuruan dan menambah latihan ketrampilan. Untuk bidang aparatur Pemerintahan dilaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta peningkatan kemampuan untuk pengembangan otonomi daerah yang dinamis dan bertanggung jawab.

1. Pembangunan Sosial Politik

Faktor utama yang mendukung pembangunan di propinsi ini adalah meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas keamanan sebagai prakondisi memantapkan pembangunan telah diusahakan di semua bidang. Untuk itu Pemerintah melalui Presiden, telah memberikan pengampunan umum kepada mereka yang sebelumnya menjadi korban bujukan orang tidak bertanggung jawab.

Partisipasi rakyat Timor Timur dalam proses pembangunan sosial politik. Ini dapat disaksikan dalam kampanye Pemilu 1982 dan pelaksanaan pemungutan suara. Pemilihan Umum berjalan lancar guna memilih wakil-wakil rakyat di DPR/MPR maupun DRPD. Setiap pemilih memberikan suaranya sesuai dengan aspirasinya. Ini merupakan pengalaman pertama dalam kehidupan sosial politik masyarakat Timor Timur.

Pemungutan suara di Timor Timur berjalan tenang dan damai. Sebanyak 311.325 pemilih menggunakan hak pilihnya pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih 4 wakil Timor Timur menduduki kursi DPR dan 40 kursi DPRD.

2. Pembangunan Bidang Ekonomi

Pembangunan prasarana dan sarana perhubungan sangat mempengaruhi proses pertumbuhan sosial dan ekonomi daerah. Di sektor perhubungan darat kondisi fisik daerah dan struktur tanah yang mudah erosi serta banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang di musim hujan banyak yang berpindah-pindah alirannya, merupakan faktor yang mempengaruhi dan menghambat pembangunan. Disamping terbatasnya alat angkutan kapal, besarnya gelombang di musim tertentu (terutama di pantai selatan) menyebabkan kurang lancarnya angkutan barang.

Taking into consideration the situation and condition encountered during the stages of implementing development, such as consolidation, rehabilitation and stabilization, the method of implementation adopted was that of a ***Crash Program.*** *This was due to the shortage of personnel at all levels of government agencies, vertical as well as autonomous.*

Athough development problems are not solved in the first three years, but in 1982/1983 up ton 1983/1984 an effort was made to implement development according to a fixed sectoral target to be achieved. This was in line with the Development Design of East Timor Province for the period 1982/1983 up ton 1983/1984.

While the short term development design of East Timor included a series of Regional Development policies which was overall, integrated in all fields for the last two years of the third Pelita or five-year development. The objective was to improve living standard, intelligence and welfare of the people through enhancing the implementation of development. The emphasis was on increasing ***Agricultural*** *production and to break the isolation of areas, both physically as well as socio-cultural. Further improvement and enhancement will cover facilities and infrastructure in* ***communications, education*** *and* ***public health.*** *Furthermore, to make people* ***aware of having a state*** *and to lay a solid foundation for further development.*

The result of development so far can create a good condition for East Timor in order to prepare itself for the following stages of development. The result of development in 1984/1985, created a Basic Design of Development for East Timor, which included problem solving, strategy and priorities of development. For the Agricultural sector, emphasis will be on increasing agricultural production, food crop, estate, animal husbandry and forestry. The sector of communications will cover repair and maintenance of infrastructure and distributed, facilities which will be extensive and equitable distributed especially the opening of isolated areas, in addition to improving the flow of passengers, cargo and services in the whole territory of East Timor province.

In addition, to improve service and provide information on public health in a harmonious way, in order to achieve a healthy level which is adequate for the whole people through efforts of improvement, prevention, curing efforts and health recovery. Meanwhile, the education sector put emphasis on basic education to eradicate illiteracy, deficiency in using and understanding the Indonesian language and basic knowledge, as weel as to improve learning and teaching facilities. Also, to meet the need for teachers, the development of vocational schools and adding skilled training. With regard to government apparatus, construction is carried out for facilities and infrastructure as well as enhancing the ability to develop dynamic and responsible regional autonomy.

1 Socio—Political Development

The main factor which supports development in this province is improving political stability and security. The stability of the security situation is a precondition for a stable development and in this respect many efforst have been carried out. Among the Government's action, through the President, a general amnesty was extended to those have become victims of seduction by irresponsible people.

Participation of the people of East Timor in the socio-political development process can be observed during the compaign for general elections in 1982 and on voting day. The general elections went off smoothly in electing representatives in the ***DPR/MPR*** *as well as* ***DPRD.*** *Every voter can cast his or her vote according to his or her own aspiration. This was the first experience is socio-political life for the East Timor community.*

In East Timor, 311.375 eligible voters used their voting right on 4 May 1982 to elect four representatives for the ***DPR*** *and 40 for the* ***DPRD.***

2 Economic Development

*The development of communications facilities and infrastructure very much influence the process of regional socio-political growth. In the sector of land communication, the physical condition of the area with soil structure which can easily erode as well as/the great number of riverbasins (****DAS,*** *Daerah Aliran Sungai) with their flow continuously changing during the rainy season, are factors which influence and constitute obstacles for development. Furthermore, the limited number of ships for transportation, the big waves during certain seasons (especially on the south coast) are a handicap for smooth transport of goods.*

The community is not yet in a position to fully support the pace of development, among other due to the method of planting rice without sufficient attention to environmental preservation. Also, the level of education is still inadequate and the limited manpower with knowledge and skill.

A potential of this region which can be utilized as basic capital for a successful development is the availability of natural resources. There is much land awaiting cultivation and the presence of minerals. Manpower is more than sufficient, in addition to the spirit and determination of the people to develop the area.

Tabel / *Table II — 1*
ALOKASI DANA PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR
TAHUN ANGGARAN : 1987/1988
DEVELOPMENT FUND ALLOCATION OF EAST TIMOR BUDGET YEAR : 1987/1988

No.	Bantuan *Assistance*	Besar Dana *Amount of fund (Rp)*	Jumlah Proyek *Number of project*
1.	Sektoral *Sectoral*	Rp. 9.493.105.000,-	103
2.	Inpres Dati I	Rp 10.627.230.374,-	107
3.	Inpres Dati II	Rp 2.770.000.000,-	70
4.	Inpres Bandes *Inpres for Rural Development*	Rp 2.483.000.000,-	14
5.	Inpres Sekolah Dasar	Rp 6.688.016.000,-	13
6.	Inpres Sarkes *Inpres for Health Development*	Rp 2.478.390.200,-	39
7.	Inpres Penj.Jalan *Inpres for Road Embetterment*	Rp 882.000.000,-	24
8.	Inpres Penghijauan *Inpres for Reforestation*	Rp 303.522.000,-	8
	Jumlah / *T o t a l*	Rp 35.275.263.573,-	378

(catatan : budget year atau fiscal year)

Masyarakat belum sepenuhnya dapat menunjang gerak langkah usaha pembangunan antara lain disebabkan cara bercocok tanam padi kurang memperhatikan kelestarian lingkungan alam. Juga tingkat pendidikan belum memadai dan terbatasnya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan.

Potensi daerah ini dapat dijadikan modal dasar keberhasilan pembangunan adalah sumber-daya alam berupa lahan yang belum digarap dan ditingkatkan maupun bahan-bahan galian tambang. Disamping tenaga kerja yang cukup besar, semangat dan tekad rakyat untuk membangun.

3. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tingkat pendidikan penduduk Timor Timur masih rendah. Bahkan sebagian besar belum mengecap pendidikan. Sebab pendidikan pada zaman Portugis diarahkan pada penyediaan tenaga yang membantu kepentingan administrasi penjajah saja. Sehingga sistim pendidikan sekedar untuk pegawai rendah. Untuk mengatasi masalah itu tahun 1976/1977 hingga tahun 1983/1984 Pemerintah Daerah membangun ruang kelas baru dan merehabilitasi ruang kelas lama. Sekarang ini di propinsi Timor Timur tersedia 1.841 ruang kelas dan dapat menampung 99.668 murid sekolah dasar dari jumlah anak usia sekolah 158.480 orang.

Pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik jasmaniah maupun rohaniah. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang tidak sedikit, baik dari sektor Pemerintah maupun dari sektor swasta. Namun peranan sektor Pemerintah masih sangat dominan di propinsi Timor Timur. Pemerintah harus bertindak sebagai motor atau penggerak pembangunan dan sekaligus pelopor pembangunan. Untuk Propinsi ini sektor swasta masih kurang peranannya dalam pembangunan. Karena itu uraian dalam bab II ini akan berkisar pada sumber-sumber pembiayaan sektor Pemerintah.

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Propinsi Timor Timur, seperti halnya dengan propinsi lain yang berasal dari Pemerintah Pusat adalah APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan INPRES (Instruksi Presiden) Lihat Tabel II-1.

Semakin meningkatnya pembangunan, berakibat semakin kompleks pula permasalahan yang timbul selama prose pembangunan berjalan. Akibatnya semakin besar biaya pembangunan yang diperlukan, baik untuk anggaran belanja rutin maupun anggaran belanja pembangunan.

Penganggaran

Dana untuk proyek sektoral meningkat pesat dari tahun ke tahun. Dalam tahun anggaran 1976/1977 sebesar Rp 232.750.000,- meningkat dalam tahun 1977/1978 menjadi sebesar Rp 3.500.000.000,- tahun 1978/1979 Rp 4.333.450.000,-, tahun 1979/1980 sebesar Rp 7.517.170.000,- tahun 1980/1981 Rp 12.415.687.000,-, tahun 1981/1982 Rp 11.490.463.

3 Social Welfare Development

The educational level of the people in East Timor is still low. In fact, the majority has never had education. Education during the Portuguese era was directed at providing personnel for the purpose of serving the interest of the colonial administration only. Therefore, the educational system was only for personnel in the lower category. In order overcome this problem, form 1976/1977 up to 1983/1984, the Regional Government built new class rooms and rehabilitated old ones. At present, there are 1.841 class rooms available in East Timor which can accommodate 99.668 primary scholl children out of the 158.480 scholl-aged.

In principle, regional development is an effort to enhance people's welfare, both physically as well as mentally. Development requires considerable financing, both from the public and the private sector. But, the Government role is still very dominant in East Timor. The Government is not only the prime mover, but also pioneer of development. In this Province, the private sector still has a minor role. Therefore, this Chapter II will deal about sources of financing from the Government.

Sources of financing development in East Timor Province, like those in the other provinces, come from the Central Government, namely, the ***APBN*** *(State Budget),* ***APBD*** *(Provincial Budget) and* ***INPRES*** *(Instruction of the President). See Table II-1.*

With the increase in development activities, so will be the complex of problems during the process of development. It will also result in increased development financing, whether this is from the routine budget as well from the development budget itself.

Tabel / *Table II — 2*
PEMBANGUNAN/REHABILITASI FASILITAS IBADAH DI TIMOR TIMUR
DEVELOPMENT/REHABILITATION OF RELIGIOUS FACILITIES IN EAST TIMOR

Tahun *Year*	Fasilitas Ibadah *Religious Facilities*				Pembiayaan *Financing*
	Katolik *Catholic*	Protestan *Protestant*	Islam *Moslem*	Hindu *Hindu*	
1976/1977	15	1	1	–	Rp 18.200.000,-
1977/1978	12	3	1	–	Rp 5.500.000,-
1978/1979	8	5	2	–	Rp 35.000.000,-
1979/1980	15	10	5	–	Rp 41.420.000,-
1980/1981	17	10	4	–	Rp 43.120.000,-
1981/1982	15	10	10	–	Rp 47.500.000,-
1982/1983	19	11	11	–	Rp 52.154.000,-
1983/1984	25	13	11	1	Rp 65.700.000,-

In the budget year 1976/1977. a regional routine budget was provided totalling Rp1.475.600.000,-, which in 1977/1978 increased to Rp3.261.700.000,-, in 1978/1979: Rp3.134.490.000,-, in 1979/1980: Rp3.617.580.000,-, in 1980/1981: Rp7.118.476.644,-, in 1981/1982: Rp9.240.065.000,-, in 1982/1983: Rp8.803.101.400,-, in 1983/1984: Rp9.189.824.000,-, making a total of Rp45.840.837.946,-.

While funds which originated from ***INPRES,*** *between 1976/1977 and 1983/1984 totalled Rp76.698.400.000,-, with the following specification: 1976/1977: Rp551.991.000,-; 1977/1978: Rp3.359.868.000,-; 1979/1980: Rp5.152.850.000,-; 1980/1981: Rp9.087.521.000,-; 1982/1983: Rp14.883.622.000,-; 1982/1983: Rp19.113.886.000,-, and in 1983/1984 the amount was Rp20.551.622.000,-.*

Meanwhile, the financing of physical development in East Timor has improved since 1978/1979. It is regretted that the physical realiza-

Budgeting

Funds for sectoral projects increased rapidly from year to year. In fiscal year 1976/1977 the amount of Rp232.750.000,- increased to Rp3.500.000.000,- in 1978/1979 it was Rp4.333.450.000,-; in 1979/1980: Rp7.517.170.000,-; in 1980/1981: Rp12.415.687.000,-; in 1981/1982: Rp11.490.463.800,-; in 1982/1983: Rp23.720.943.760,- and in fiscal year 1983/1984 the amount was Rp21.988.987.000,-; making a total amount of Rp85.197.452.560,-.

While the educational budget for building primary schools in this province from 1977/1978 until 1985/1986 totalled Rp26.481.291.500,-. The amount in 1977/1978 was Rp551.135.000,-, while in the budget year 1985/1986 in increased to Rp7.332.540.500,-.

Each year there was also an increase in expenditures for the development and rehabilitation of religious facilities, for the Catholic religion, Protestant, Islam and Hindu. In 1976/1977, the amount reached Rp18.200.000,-, increasinf in 1980/1981 to Rp43.120.000,-, in fiscal year 1983/1984, the total amount became Rp65.700.000,-. Table II — 1 will provide a better picture of expenditures from 1976/1977 to 1983/1984.

800,- tahun 1982/1983 Rp 23.720.943.760,- dan dalam tahun anggaran 1983/1984 sebesar Rp 21.988.987,000,- , dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 85.197.452.560,-

Sedang anggaran bidang pendidikan untuk pembangunan sekolah dasar di propinsi ini dari tahun 1977/1978 hingga tahun 1985/1986 berjumlah sebesar Rp 26.481.291.500,-. Dalam tahun 1977/1978 sebesar Rp 551.135.000,- kemudian dalam tahun anggaran 1985/1986 meningkat menjadi Rp 7.332.540.500,-.

Untuk pembangunan dan rehabilitas fasilitas ibadah di Timor Timur dari agama Katholik, Protestan, Islam dan Hindu tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam tahun 1976/1977 dana mencapai sebesar Rp 18.200.000,-. Sedang dalam tahun 1980/1981 meningkat menjadi sebesar Rp 43.120.000,-, kemudian dalam tahun anggaran 1983/1984 mencapai sebesar Rp 65.700.000,-. Untuk jelasnya uraian pembiayaan dari tahun 1976/1977 hingga tahun 1983/1984 **Lihat Tabel II-3.**

Dalam tahun anggaran 1976/1977, Anggaran Rutin Daerah yang disediakan sebesar Rp 1.475.600.000,- dalam tahun 1977/1978 meningkat menjadi Rp 3.261.700.000,- tahun 1978/1979 Rp 3.134.490.000,- tahun 1979/1980 Rp 3.617.580.000,- tahun 1980/1981 Rp 7.118.476.644, kemudian dalam tahun 1981/1982 Rp 9.240.065.000,- tahun 1982/1983 sebesar Rp 8.803.101.400,- dan dalam tahun 1983/1984, sebesar Rp 9.189.824.000,- dengan jumlah dana keseluruhan mencapai sebesar Rp 45.840.837.946,-.

Sedangkan dana yang berasal dari INPRES dari tahun 1976/1977 hingga tahun 1983/1984 berjumlah Rp 76.698.400.000,- Dengan perincian untuk tahun 1976/1977 Rp 551.991.000,- tahun 1977/1978 Rp 3.359.868.000,- tahun 1978/1979 sebesar Rp 3.997.000.000,- tahun 1979/1980 Rp 5.152.850.000,- tahun 1980/1981 Rp 9.087.521.000,- tahun 1981/82 Rp 14.883.622.000,- tahun 1982/1983 sebesar Rp 19.113.886.000,- dan dalam tahun 1983/1984 sebesar Rp 20.551.622.000,-

Sementara itu sejak tahun 1978/1979 pendanaan pembangunan fisik di Timor Timur sudah mulai membaik. Disayangkan realisasi fisik belum mencapai tingkat optimal sesuai dengan realisasi keuangan. Hal ini disebabkan adanya Pimpinan Proyek Tunggal yang berkedudukan di daerah Tingkat I.

Disamping itu Bappeda Tingkat II belum ada dan akan dimulai pembentukannya dalam Pelita IV. Namun sejak awal Pelita IV peranan Pemerintah Dati II, telah ditingkatkan dengan dihilangkannya Sistem Pimpinan Proyek Tunggal dan adanya Inpres Dati II, Inpres Bantuan Desa dan Inpres SD yang kesemuanya ini merupakan Proyek-proyek tingkat Kabupaten. Demikian pula Proyek Penunjangan Jalan dan Proyek Kesehatan diserahkan pada Daerah Tingkat II. Dalam tahun 1983, APBD Timor Timur ditetapkan oleh DPRD dan disyahkan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

4. INPRES SD.

Propinsi ini dari tahun anggaran 1976/1977 hingga tahun 1985/1986 mendapat INPRES Bantuan Sekolah Dasar sebesar Rp 23.232.905.000,-, tahun 1976/1977 mendapat dana sebesar Rp 32.000.000,- tahun 1980/1981 Rp 989.085.000,- dan dalam tahun 1985/1986 meningkat, menjadi sebesar Rp 7.332.540.000,-. Untuk jelasnya mengenai perincian dana tiap tahun anggaran dari tahun 1976 hingga tahun 1986

Anggaran sebesar Rp 23.232.905.000,- tersebut dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan 3 (tiga) buah SD, 6 (enam) lokal, 150 buah unit I, 113 unit II, rumah dinas guru 121 buah, rumah dinas kepala sekolah 134 buah, rumah dinas penjaga sekolah 169 buah, penambahan ruang kelas baru 111 buah, rehabilitasi gedung sekolah dasar 190 buah, penyediaan air minum 197 buah dan pembangunan sekolah darurat sebanyak 150 buah.

Sedangkan untuk tahun anggaran 1983/1984 sampai dengan tahun anggaran 1985/1986 untuk melaksanakan pembangunan 156 buah unit I, 132 unit II, rumah dinas guru 702 buah, rumah dinas kepala sekolah 156 buah, rumah dinas penjaga sekolah 109 buah, penambahan ruang kelas 210 buah, rehabilitasi berat 15 buah, rehabilitasi ringan 46 buah, penyediaan air bersih 103 buah dan pembangunan SD bertingkat untuk unit I dan unit II di Dili 1 buah dan 4 buah lagi untuk proyek anggaran 1985/1986.

Selanjutnya pada tahun anggaran 1976/1977, 1977/1978 pada umumnya bersifat rehabilitasi, kecuali 6 buah SD unit I yang merupakan bangunan baru. Sedangkan pada tahun 1978/1979 seluruh dana diarahkan untuk keperluan yang bersifat rehabilitasi sosial yang berupa antara lain pengadaan bahan makanan dan 1979/980 bersifat pembangunan unit Sekolah Dasar, rumah guru yang bersifat darurat pada 150 lokasi pemukiman dan pengadaan peralatan pada sekolah Dasar di 150 lokasi pemukiman serta sekolah Dasar di luar lokasi pemukiman, selanjutnya pada tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1982/1983

tion has not yet reached the level of actual expenditures. This was due to the fact that the Sole Project Management resided in the Daerah Tingkat I, ***DATI—I*** *(Province).*

*Furthermore, there was no **Bappeda Tingkat II** or District Development Agency and its establishment will start in Pelita IV. Yet, since the start of Pelita IV, the role of DATI — II Administration has been enhanced with the abolishment of the Sole Project Management System and the presence of **Inpres Dati II**, Inpres for Rural and Primary School Developments, all of which constitute Projects of District level. Also, the Project for Road Embetterment was transferred to Dati—II. In 1983, East Timor's budget was determined by the **DPRD** and approved by the Governor and the Minister of Home Affairs.*

4 INPRES SD

From budget year 1976/1977 until 1985/1986, this Province received INPRES—Aid for Primary School Development: Rp23.232.905.000,- in 1976/1977 it was Rp32.000.000,-, in 1980/1981: Rp989.085.000,- and in 1985/1986 increased to Rp7.332.540.000,-. A detailed account of the annual budget from 1976 until 1986 is shown in Table II — 3

The total budget of Rp23.232.905.000,- was utilized for the construction of three Primary Schools, six class rooms, 150 Unit I, 113 Unit II, 121 government houses for teachers, 134 government houses for headmasters, 169 government houses for school guards, 111 new additional class rooms, rehabilitation of 190 Primary schools, 197 drinking facilities and the building of 150 emergency schools.

Tabel / *Table II — 3*

No.	Tahun Anggaran *Fiscal Year*	Besarnya Anggaran *Amount of Fund (Rp)*	Keterangan *Remark*
1	2	3	4
1.	19876 / 1977	Rp 32.000.000,-	
2.	1977 / 1978	Rp 527.135.000,-	
3.	1978 / 1979	Rp 550.000.000,-	
4.	1979 / 1980	Rp 796.465.000,-	
5.	1980 / 1981	Rp 989.085.000,-	
6.	1981 / 1982	Rp 1.699.092.000,-	
7.	1982 / 1983	Rp 3.491.300.000,-	
8.	1983 / 1984	Rp 4.625.189.000,-	
9.	1984 / 1985	Rp 3.190.000.000,-	
10.	1985 / 1986	Rp 7.332.540.000,-	
	Jumlah/Total	Rp 23.232.905.000,-	

While in the budget year 1983/1984 up to budget year 1985/1986, the following construction took place: 156 Unit I, 132 Unit II, 702 government houses for teachers, 156 government houses for headmasters, 109 government houses for school guards, 210 additional class rooms, 15 major rehabilitation, 46 minor rehabilitation, 103 clean water facilities, a storied primary school for Unit I and Unit II in Dili and another four in the budget project 1985/1986.

With regard to the budget years 1976/1977, 1977/1978, it was generally rehabilitation in nature, except six new buildings for Primary School Unit I. While in the budget year 1978/1979, the whole fund was utilized for the purpose of social rehabilitation, such as providing foodstuff and 1979/1980 for the construction of Primary School units, housing for teachers of an emergency character at 150 settlement locations and providing equipment for Primary Schools at 150 settlement locations and outside the settlement locations; henceforth, in budget year 1980/1981 up to 1982/1983, the implementation of INPRES Primary School was directed in the same way as it was carried out in other provinces of Indonesia.

*The implementation of development in accordance with the philosophy of Inpres was carried out after the transfer of chairmanship of **TPP** (Team for Implementing Development) from the Assistant of Operations of **Hankam** (defense and security) to the Assistent of Intelligence and the coming into function of the Tim Pelaksana Pembangunan Daerah (**TPD**, Regional Team for Implementing Development) which was formulated in the Decision of the Governor of East Timor, No 48 of 1980 dated 22 July 1980, where coordination at the Regional Level was previously arranged by the Staff of Territorial Coordination of East Timor Province.*

a. Implementation of Inpres SD 1976/1977 up to 1979/1980 :

1. In 1976/1977, expenditures totalled Rp32.000.000,-

Utilization of development fund was for the rehabilitation of eight primary school units in Dili at a cost of Rp8.000.000,- (eight million rupiah) and

pelaksanaan INPRES Sekolah Dasar sudah diarahkan sebagaimana halnya dengan pembangunan Sekolah Dasar Inpres seperti Propinsi-propinsi lainnya di Indonesia.

Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan falsafah Inpres dilaksanakan setelah pengalihan ketua TPP dari Asisten Operasi Hankam kepada Asisten Intel dan berfungsinya Tim Pelaksana Pembangunan Daerah (TPD) yang dituangkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur No 48 Tahun 1980 tanggal 22 Juli 1980, dimana koordinasi di Tingkat Daerah sebelumnya diatur Staf Koordinasi Kewilayahan Propinsi Timor Timur.

PELAKSANAAN INPRES SD 1976/1977 sampai dengan 1979/1980 :

1. **Tahun 1976/1977 dengan biaya sebesar Rp 32.000.000,-.**
Pelaksanaan penggunaan dana ini ialah untuk rehabilitasi 8 unit sekolah dasar di Dili dengan biaya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan rehabilitasi Sekolah Dasar di 12 Kabupaten diluar Kabupaten Dili sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta), masing-masing Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap Kabupaten.

2. **Tahun 1977/1978 dengan biaya sebesar Rp 527.135.000,-**
Pelaksanaan penggunaan dana ini adalah untuk pembangunan 6 sekolah dasar unit I, rehabilitasi 44 sekolah dasar dan pemasangan 37. buah pompa air dalam rangka penyediaan air bersih.

3. **Tahun 1978/1979 dengan biaya sebesar Rp 550.000.000,-**
Pelaksanaan penggunaan dana ini adalah untuk pengadaan bahan makanan untuk kepentingan rakyat yng pelaksanaannya diatur oleh Departemen Dalam Negeri dan TPP yang diketuai oleh asisten Operasi Hankam, sehingga Dana tersebut diatas sama sekali tidak ada yang dipergunakan untuk Pembangunan Sekolah Dasar.

4. **Tahun 1979/1980 dengan biaya sebesar Rp 796.465.000,-**
Pelaksanaan penggunaan dana ini tidak dipergunakan menurut falsafah Inpres, akan tetapi penggunaannya diarahkan antara lain untuk pelaksanaan Pembangunan Sekolah Dasar dan rumah guru darurat pada 150 lokasi pemukiman di 50 Kecamatan.
Disamping itu, untuk pengadaan peralatan Sekolah Dasar pada 150 lokasi pemukiman dan pengadaan peralatan diluar 150 lokasi pemukiman dengan jumlah biaya seluruhnya adalah Rp 616.125.000,- (enam ratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan Rp 180.340.000,- (seratus delapan puluh tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk pembinaan tenaga kerja sebesar Rp 56.640.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), pendidikan dan latihan pegawai sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pembinaan Wanra dan ex GPK Rp 43.875.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan penataran pejabat daerah sebesar Rp 4.825.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. PELAKSANAAN INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN 1980/1981:

1. **Tahun 1980/1981 dengan biaya sebesar Rp 989.085.000,-**
Pelaksanaan penggunaan dana ini untuk melaksanakan pembangunan Sekolah Dasar 6 lokasi sebanyak 3 buah Sekolah Dasar Negeri Unit I, 12 buah, penyediaan air bersih 23 Sekolah Dasar Unit II sebanyak 42 buah, rehabilitasi Sekolah Negeri sebanyak 15 buah dan untuk pembinaan Sekolah Dasar sebanyak Rp 23.320.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2. **Tahun 1981/1982 dengan biaya sebesar Rp 1.699.092.000,-**
Pelaksanaan penggunaan anggaran ni dipergunakan untuk melaksanakan Pembangunan Sekolah Dasar Unit I sebanyak 55 buah, Sekolah Dasar Unit II sebanyak 14 buah, penyediaan air bersih 57 buah, penambahan ruang kelas baru 28 buah, perumahan guru 25 buah, rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar 33 buah dan kepentingan Pembinaan Sekolah Dasar sebanyak Rp 34.044.000,- (tiga puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah).

3. **Tahun 1982/1983 dengan biaya sebesar Rp 3.491.399.000,-**
Pelaksanaan penggunaan dana ini dipergunakan untuk melaksanakan Pembangunan Sekolah Dasar Unit I sebanyak 80 buah, Sekolah Dasar Unit II sebanyak 57 buah, penyediaan air bersih 8 buah, penambahan ruang kelas baru 65 buah, perumahan guru sebanyak 96 buah, rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar sebanyak 66 buah.

4. **Tahun 1983/1984**
Tahun anggaran 1983/1984, dengan biaya sebesar Rp 4.588.279.000,- ditambah biaya Pembinaan dan pengendalian Unit 13 Kabupaten se-

the rehabilitation of 12 primary schools in 12 Districts outside Dili District, at a cost of Rp24.000.000,- (twenty four million rupiah), respectively Rp2.000.000,- (two million rupiah) for each District.

2. *In 1977/1978, expenditures totalled Rp527.135.000,-*

Utilization of development fund was the construction of six primary schools Unit I, rehabilitation of 44 elementary scholls and the installing of 37 water pumps within the scope of providing clean water.

3. *In 1978/1979, expenditures totalled Rp550.000.000,-*

Utilization of this development fund was to provide foodstuff for the people's interest and its implementations was arranged by the Department of Home Affairs and the TPP which was chaired by the Assistant of Operations of Hankam, so that none of the fund was utilized for the construction of primary schools.

4. *In 1979/1980, expenditures totalled Rp796.465.000,-*

Utilization of this fund was not carried out according to the philosophy of Inpres, but among other directed at implementing the construction of Primary Schools, and emergency teachers houses at 150 settlement locations in 50 Sub-districts.
In addition, to provide equipment for Primary Scholls at 150 settlement locations and providing equipment outside the 150 settlement locations with expenditures totalling Rp616.125.000,- (six hundred and sixteen million one hundred and twenty-five thousand rupiah), while Rp180.340.000,- (one hundred and eighty million three hundred and forty thousand rupiah) was used for the following: manpower development a sum of Rp56.640.000,- (fifty-six million six hundred and forty thousand rupiah), education and training of personnel a total of Rp65.000.000,- (sixty-five million rupiah), the guidance of Wanra (people's resistance) and ex G P K an amount of Rp43.875.000,- (forty three million eight hundred and seventy-five thousand rupiah), and for upgrading regional officials totalling Rp4.825.000,- (four eight hundred and twenty-five thousand rupiah).

b. Implementation of Inpres Primary School in 1980/1981

1. *In 1980/1981 expenditures totalled Rp989.085.000,-*

Utilization of this fund was for implementing the construction of three Primary Scholls with 6 class rooms, 12 State Primary Schools Unit I, providing 42 clean water facilities for 23 Primary Schools Unit II, rehabilitation Of 15 State Schools and Rp23.320.000,- (twenty three million three hundred and twenty thousand rupiah) for the guidance of Primary Schools.

2. *In 1981/1982 expenditures totalled Rp1.699.092.000,-*

Utilization of this budget was for the construction of 55 Primary Schools Unit I, 14 Primary Shcools Unit II, 57 facilities for cleanm water, 28 additional class rooms, 25 houses for teachers, rehabilitation of 33 Primary Schools and for the guidance of Primary Schools an amount of Rp34.044.000,- (thirty four million forty-four thousand rupiah).

3. *In 1982/1983 expenditures totalled Rp3.491.399.000,-*

Utilization of this fund as for the construction of 80 Primary Schools Unit I, 57 Primary Schools Unit II, 8 facilities for clean water, 65 additional class rooms, 96 houses for teachers and rehabilitation of 66 Primary Schools.

4. *In 1983/1984*

The budget in 1983/1984 which was Rp4.588.279.000,- plus Rp36.910.000,- as expenditures for guidance and control of Units in 13 Districts, so that the total budget ceiling according to DIPDA (List of Regional Projects) amount to Rp4.625.189.000,- (four billion six hundred and twenty-five million one hundred and ninety thousand rupiah).
a the construction of 62 Primary Schools Unit I;
b the construction of 67 Primary Schools Unit II;
c the construction of a one-storey Primary School Unit I and II;
d 62 clean water facilities;
e 52 additional class rooms;
f the construction of 68 government houses for school guards;
g the construction of 95 government houses for Headmasters;
h the construction of 207 government houses for teachers;
i ten major rehabilitation work;
j two minor rehabilitation work.
So that the total expenditures realized reached a total of Rp4.542.013.839,- (four billion five hundred and forty-two million eight hundred and thirty-nine rupiah), with physical percentage —% and financial percentage of 98.20%.
The above indicates, that in the budget year 1983/1984, there was a balance of Rp83.175.370,- from the allocated fund because something went

besar Rp 36.910.000,- sehingga jumlah seluruh anggaran menurut DIPDA menjadi sebesar Rp 4.625.189.000,- (empat miliar enam ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Kemudian pelaksanaan anggaran ini digunakan untuk :
a. Pembangunan Sekolah Dasar Unit I, 62 buah.
b. Pembangunan Sekolah Dasar Unit II, 67 buah.
c. Pembangunan Sekolah Dasar Unit I dan II bertingkat 1 buah.
d. Fasilitas air bersih 62 buah.
e. Penambahan Ruang kelas 52 buah.
f. Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah 68 buah.
g. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah 95 buah.
h. Pembangunan Perumahan guru 207 buah.
i. Rehabilitasi berat 10 buah.
j. Rehabilitasi ringan 2 buah.

Sehingga realisasi keuangan seluruhnya mencapai sebesar Rp 4.542.013.839,- (empat miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), dengan prosentase fisik - % dan prosentase keuangan 98,20%.

Berarti sisa anggaran untuk tahun 1983/1984 sebesar Rp 83.175.160,37,- dari dana yang tersedia ini disebabkan oleh karena pemborongnya macet, tidak dapat melanjutkan pekerjaannya.

5. Tahun anggaran 1984/1985

Tahun anggaran 1984/1985 dana yang tersedia sebesar Rp 3.190.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah), menurut DIPDA, dana ini dipergunakan untuk :
a. Pembangunan Sekolah Dasar Unit I 55 buah.
b. Pembangunan Sekolah Dasar Unit II 15 buah.
c. Penambahan ruang kelas baru sebanyak 158 buah.

Sehingga realisasi keuangan seluruhnya mencapai Rp 2.927.758.000,- (dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan prosentase fisik - %, dan prosentase realisasi keuangan sebesar 91,77%, berarti masih ada sisa anggaran sebesar Rp 262.242.000,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Dari dana yang tersedia ini disebabkan karena beberapa proyek Sekolah Dasar di Kabuputen Ainaro dan Kabupaten Same tidak sempat dikerjakan oleh Pemborong karena lokasinya sulit dijangkau.

Dana yang dikelola oleh Dinas P dan K Dati II sebesar Rp 4.121.000.000,- (empat miliar seratus dua puluh satu juta rupiah), jadi jumlah seluruhnya Rp 7.311.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus sebelas juta rupiah).

6. Tahun anggaran 1985/1986

Tahun anggaran 1985/1986 dana yang tersedia adalah Rp 7.332.340.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), menurut DIPDA dana ini digunakan untuk : Pembangunan SD Unit I, 37 buah; SD Unit II, 50 buah; penyediaan fasilitas air bersih 41 buah, rumah Dinas Kepala Sekolah 61 buah, perumahan guru 495 buah, rehabilitasi berat 5 buah, rehabilitasi ringan 44 buah dan Pembangunan SD bertingkat 4 buah, realisasi pelaksanaan mencapai fisik 0% dan keuangan 19%.

Dari dana yang tersisa ini disebabkan karena pelaksanaan proyek belum selesai dan masih harus dilanjutkan dalam tahun anggaran 1986/1987 mendatang disamping keterlambatan turunnya DIPDA.

c. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INPRES SD :

1. Tahun 1976/1977 sampai dengan tahun 1979/1980

Pelaksanaan Pembangunan Sekolah Dasar pada tahun 1976/1977 diserahkan pelaksanaannya kepada Daerah Tingkat II masing-masing, namun karena kesulitan tenaga Administrasi dan kurang terarahnya penggunaan dana, maka dipertimbangkan pelaksanaan Pembangunan SD diarahkan pada Daerah Tingkat I.

Selanjutnya pada tahun 1978/1979 dana Inpres Sekolah Dasar diarahkan oleh Departemen Dalam Negeri dan TPP untuk keperluan yang bersifat rehabilitasi sosial.

Pelaksanaan penggunana dana pada waktu itu langsung ditangani oleh pusat, sedangkan Daerah hanya menerima barang-barang keperluan sosial yang dikirim oleh pusat ke Dili. Pada tahun 1979/1980 dana Inpres SD penggunaannya diarahkan pada usaha untuk melaksanakan pembangunan 150 Unit Sekolah Dasar dan 150 rumah guru darurat, ditambah dengan pengadaan peralatan pada 150 lokasi pemukiman yang ditetapkan pada waktu itu serta pengadaan peralatan.

2. Tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1982/1983

Pelaksanaan Pembangunan fisik Sekolah Dasar pada tahun 1980/1981 sampai dengan 1982/1983 dilaksanakan dengan mengikuti falsafah

wrong with the contractor and he could not complete his work.

5. Budget year 1984/1985

The fund available for budget year 1984/985 was Rp3.190.000.000,- (three billion one hundred and ninety million rupiah) according to ***DIPA*** *and to be used for :*
a constructing 55 Primary Schools Unit I;
b constructing 15 Primary Schools Unit II;
c constructing 158 additional class rooms.

Total expenditures realized was Rp2.927.758.000,- (seven billion nine hundred and twenty-seven million seven hundred and fifty eight thousand rupiah), with physical percentage of —% and expenditures percentage of 91.77%, leaving a balance of Rp262.242.000,- (two hundred and sixty-two million two hundred and fourty-two-thousand rupiah).

From this fund, several primary scholl projects could not be carried out in Ainaro District and Same District because the location was hard to reach by the contractor.

The fund managed by the Education and Cultural Service of ***Dati II*** *was Rp4.121.000.000,- (four billion one hundred and twenty-one million rupiah), so the total amount was Rp7.311.000.000,- (seven billion three hundred and eleven million rupiah).*

6. Budget year 1985/1986

The fund available in budget year 1985/1986 was Rp7.332.540.000,- (seven billion three hundred and thirty-two million five hundred and fourty thousand rupiah) according ti DIPA and to be used for: the construction 37 primary schools Unit I, 37 SD Unit II, 41 facilities for clean water, 61 government houses for Headmasters, 495 government houses for teachers, five major rehabilitation work, 44 minor rehabilitation work and the construction of four - storied Primary Schools Physical implementation achieved was 0 (zero) percent, and financial 19%. With the project not completed there was a balance left in the 1985/1986 budget which will be used in the coming budget year to complete the project. Work delay was also due to late approval of ***DIPA*** *(List of Regional Projects).*

c. Mechanysm in Implementation Construction of Inpres SD

1. Budget year 1976/1977 up to 1979/1980 :

Implementing the construction of Primary Schools in 1976/1977 was handed over to the respective ***DATI II,*** *yet due to shortage in administrative personnel and inadequate guidance in utilizing funds, it was considered that implementing the construction of Primary School be given to the* ***DATI—I.***

Then, in the budget year 1978/1979, the ***Inpres SD—fund was directed by the Department of Home Affairs and the TPP*** *for purpose having a character of social rehabilitation.*

At that time, implementing the use of funds was directly handled by the Central government, while the Region only received items for social requirements, sent by the Central Government to Dili.

In 1979/1980, the ***Inpres SD*** *fund's utilization was directed at activities to implement the construction of 150 emergency houses for teachers, in addition to providing equipment at 150 settlement location established at that time.*

2. Budget year 1980/1981 up to 1982/1983 :

Implementing the physical construction of Primary Schools in 1980/1981 up to 1982/1983 was according to Inpres philosophy, i.e. all programs of ***Inpres SD*** *were carried out in the field, similar to the way of implementation in the other provinces of Indonesia.*

The mechanism of implementing the Inpres program in this area differed from the other provinces in Indonesia. This was because the inadequate ability of the apparatus in ***DATI—II*** *was felt very much. Furthermore, there was still an absence of Government Services in the District, both Educational and Cultural Service as well as Public Works Service at District Level, which could provide the expected technical assistance in tacking the project's construction*

The same was true the Administration at District Level, where the ***Bupati*** *lacked the apparatus in order to perform the duties properly.*

Another problem in 1980/1981 was communications between District and Sub-district, so that a policy had to be pursued where handling of ***Inpres SD*** *up to 1982/1983 was in one had, i.e. the Assistant for Economy, Development and People's Welfare, based on instruction of the Minister of Home Affairs and then formulated in a decision of the Governor of East Timor Province as Project Leader of Primary School by appointing the Head of Education and Cultural Service as Sub-project Head.*

For control pruposes at the District Level, was appointed the ***Muspida*** *(Muayswarah Pimpinan Daerah or Regional Executive Council) and an official of Public Works as Field Supervisor. At the Provincial level, the Governor of East East Timor based on the Instruction of the Minister of Home Af-*

Inpres, artinya semua program Inpres Sekolah Dasar dilaksanakan di lapangan seperti halnya dengan pelaksanaan Inpres di Propinsi lainnya di Indonesia.

Program Inpres yang dilaksanakan di daerah ini mekanismenya masih berbeda dengan propinsi lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kemampuan aparatur di Daerah Tingkat II Kabupaten masih dirasakan sangat kurang. Disamping itu secara formal Dinas-dinas di Daerah Kabupaten belum ada, baik Dinas P dan K Tk II, maupun Dinas PU Tk II yang diharapkan dapat membantu secara teknis dalam penanganan Pembangunan SD di Tingkat Kabupaten.

Begitu pula halnya dengan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dimana para Bupati belum memiliki aparat untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Kesulitan lain adalah perhubungan antara Kabupaten dengan Kecamatan pada tahun 1980/1981, sehingga ditempuh kebijaksanaan dalam penanganan Inpres Sekolah Dasar sampai pada tahun 1982/1983 dibawah satu tangan, yaitu Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang kemudian dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai Pimpinan Proyek Sekolah Dasar dengan menunjuk Kepala Dinas P dan K selaku Pimpinan Sub Proyek.

Untuk kepentingan pengawasan di tingkat Kabupaten ditunjuk Muspida setempat dan petugas PU selaku Pengawas lapangan, pada Tingkat Propinsi dibentuk Badan Pengawas Pekerjaan yang bertugas menyaring kembali hasil pengawasan lapangan yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

3. **Tahun Anggaran 1983/1984,**

Pembangunan SD ditangani seluruhnya oleh Dinas P dan K dan pada tahun anggaran 1984/1985 dan 1985/1986. Pembangunan SD Inpres sebagian ditangani oleh Dinas P & K Tingkat I dan sebagian lagi oleh Dinas P & K Tingkat II masing-masing.

Pembangunan SD yang ditangani oleh Dinas P & K Tingkat I adalah Gedung SD Unit I dan II, sedangkan yang ditangani oleh Dinas P & K Tingkat II : Perumahan Guru/penjaga SD, rumah Kepala SD.

5. **Proyek Inpres Dati I Tentang Pengadaan Alat Peraga**

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar, maka pemerintah Pusat telah menyalurkan anggaran/dana setiap tahun anggaran guna keperluan pembelian/pengadaan sarana dan alat peraga melalui dana Inpres Daerah Tingkat I.

Tujuan dari pada pengadaan sarana dan alat peraga tersebut adalah untuk membantu kelancaran pelaksanaan program belajar mengejar di sekolah-sekolah, khususnya pada tingkat Sekolah Dasar, baik SD negeri maupun swasta.

Pengadaan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar berupa buku-buku paket antara lain seperti buku IPS, IPA, bahasa Indonesia dan buku-buku bacaan lainnya, serta pengadaan peraga SD seperti : Torso pria/wanita, alat peraga IPA dan Matematika yang dapat digunakan oleh para guru dan murid dalam proses belajar-mengajar.

Anggaran belanja pembangunan

Anggaran belanja pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur Anggaran 1984/1985 mengalami perubahan dengan penetapan PERDA No 01 tahun 1985 sebesar Rp 22.390.668.816,85 tidak termasuk bagian Urusan Kas dan Perhitungan. Adapun realisasi Kas sampai tanggal 28 Februari 1985 sebesar Rp 6.149.675.113,- atau 27,46% jika dibandingkan Plafond. Realisasi keseluruhan Belanja Pembangunan menurut sektor Lihat Tabel II-4.

6. **Proyek Pembangunan Kehutanan**

Proyek penghijauan dan peningkatan sarana fisik Inpres Dati I Timor Timur dalam tahun anggaran 1983/1984 berjumlah Rp 100.000.000,- dengan sumber dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), tahun 1984/1985 sebesar Rp 128.000.000,- dengan sisa dana sebesar Rp 27.268.635,-. Tahun 1985/1986 jumlah dana sebesar Rp 77.000.000,- dengan sisa dana Rp 36.750.490,-.

Sedang dana rehabilitasi dan pembinaan areal cendana untuk tahun 1985/1986 sebesar Rp 14.571.400,-.
Untuk peningkatan kehutanan Timor Timur dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 44.527.000,- dengan sisa dana Rp 21.891.000,-. Tahun 1985/1986 dengan dana sebesar Rp 34.396.000,- dan sisa dana Rp 3.915.125,-. Kemudian dalam tahun 1986/1987 sebesar Rp 45.000.000,- dengan realisasi sebesar 14%.

Untuk Inpres murni yaitu bantuan penghijauan dan reboisasi tahun 1985/1986 sebesar Rp 50.497.000,- dengan sisa dana Rp 12.739.490,-. Dalam tahun 1986/1987 sebesar Rp 80.396.590,- (untuk penghijauan).

fairs, established a Project Supervisory Body with the task of reviewing the result of field supervision.

3. Budget year 1983/1984

*The construction of Primary Schools was all in the hands of the Education and Cultural Service and in the budget year 1984/1985 and 1985/1986, construction of **Inpres SD** was one part by the Provincial Education and Cultural Service and the other part by the District Education and Cultural Service.*

The construction of SD Unit I and II was by the Provincial Education and Cultural Service, while the District Service took housing construction for teachers, school guards and head masters.

4. Project of Inpres Dati—I on Providing Display Equipment

*Within the framework of improving the quality of education at Primary School level, each year the Central Government allocated budget/funds for purchasing/providing facilities and display equipment through **Inpres fund DATI I.***

The objective of providing facilities and display equipment is to assist a smooth implementation of the learning and teaching program at the schools, both public as well as private primary schools.

*Providing educational facilities for primary schools in the form of package-books, containing among other books on social science **(IPS)**, natural science **(IPA)**, bahasa Indonesia (Indonesian language) and other reading material, as well as providing display equipment for primary schools, such as torso of male and female, display material for IPA and mathematics which can be used by teachers and pupils in the learning and teaching process.*

5. Development Budget

*The development budget of East Timor Province experienced changes in the budget year 1984/1985, amounting Rp22.390.668.816.85,- with the establishment of **PERDA** (Regional Regulation) No 01 Of 1985, not included Cash balance and Accounts.*

Up to 28 February 1955, cash realization was Rp6.149.675.113,- or 27.46% compared with the ceiling. Table II — 4 will show realization of the total development expenditures.

6. Forestry Development Project

*Projects of regreening and enhancing physical facilities of East Timor's DATI—I in budget year 1983/1984 totalled Rp100.000.000,-, originating from **APBD** (Regional Budget), in 1984/1985 it was Rp128.000.000,- with a balance in funds totalling Rp27.268.635,-. In 1985/1986 the fund totalled Rp77.000.000,- with a balance of Rp36.750.490,-.*

*While the amount of fund rehabilitation and promotion of cendana (sandalwood) area in 1985/1986 was Rp14.571.400,-. For enhancing East Timor's forestry, the fund from the State Budget of **APBN** was Rp44.527.000,-, with a balance of Rp21.891.000,-. In 1985/1986, the fund was Rp34.396.000,-, with a balance of Rp3.915.125,-. Then in 1986/1987, the allocated fund was Rp45.000.000,- with a realization of 14%.*
For clean Inpres, namely assistance for regreening and reforestation in 1985/1986, the fund was Rp50.497.000,- with a balance of Rp12.739.490,-. In 1986/1987 a sum of Rp 80.396.590,- (for regreening).

The project of reforestation assistance in 1986/1987 totalled Rp45.618.000,- with a realization of 13.8%.

*The project of regional forestry development with funds from **IHH (Iuran Hasil Hutan**, Forest Products Contribution) in 1981/1982, totalled Rp100.000.000,-, in 1982/1983 it was Rp79.000.000,- and Rp54.000.000,- in 1983/1984.*

7. Rural Development

Rural development in the Province of East Timor was carried out in budget year 1977/1978, covering four activities, namely the development of social, communication, agricultural production and market infrastructures. The development of such infrastructure covered construction, among other, of 34 village council halls, 157 people's houses and four churches. In addition, the construction of one bridge and nine kilometers of road, 10 pumping wells and two markets.

*In Pelita III, rural development was more intensified with funds totalling Rp790.000.000,- Included in the activities were the construction of low cost housing for community leaders, village council halls, low cost housing for members of civil defense, houses for former members of **GPK** (Gerakan Pengacau Keamanan, a rebellious group), the construction of public bath, wash and toilet facilities **(MCK)**, providing agricultural equipment, seeds, labor tools and material assistance for the construction of religious facilities.*

In the housing sector, the development objective in this province was building 340 low cost houses for community leaders, measuring 36 square



Berbagai kesenian tradisional dan pesta rakyat, turut memperkaya kebudayaan Timor Timur. Potensi ini banyak mendukung kepentingan pembangunan di bidang kepariwisataan. Dalam gambar nampak Presiden beserta Ibu Tien Soeharto didampingi Gubernur ketika berkunjung di Dili Timor Timur. Sedang gambar lainnya terlihat kegiatan taritarian yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan konvoi penduduk yang berkuda membawa bendera Merah Putih melambangkan perwujudan hati rakyat Timor Timur dalam berintegrasi.









Numerous kinds of traditional arts and people's feasts enrich the culture of East Timor. This potential means a lot for the development of tourism sector. Appearing on the picture are President Soeharto and Madame Tien Soeharto accompanied by the Governor of East Timor Province paying a visit in Dili. Other pictures show a typical dance attended by many people, and a convoy of people riding on horses while carrying the National Flag, the Red and White, symbolizing the intention of East Timor people to be integrated with the Indonesian Nation.









Pembangunan fisik di Timor Timur sedang giat-giatnya dilaksanakan. Semuanya ini dilakukan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lain-nya di Indonesia. Seperti dalam gambar terlihat beberapa fasilitas pembangunan gedung kantor sebagai alat kelengkapan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini. Nampak dalam gambar Kantor Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur, Pengadilan Negeri/Ekonomi Dili, Dinas Sosial Timor Timur, Kehakiman dan Kantor Kepala Daerah Tingkat II Rinaro.

The physical development in East Timor is actively carried out. This effort is taken to catch up its backwardness in comparison with development in other regions in Indonesia. Appearing on the pictures area a few development facilities of office buildings to help enhance the regional administration.
Other pictures show the Office of Governor/Head of Regional Administration of East Timor Province; Court of Justice Economy in Dili; Social Office of East Timor; Office of Justice and Office of Head of the Regional Administration of Rinaro District.

Disamping pembangunan gedung kantor juga pembangunan sarana-sarana lainnya amat gencar dilaksanakan termasuk pembangunan perumahan dan transportasi untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Seperti dalam gambar terlihat pembangunan perumahan dengan fasilitas KPR-BTN, serta partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di daerah ini. Sedang gambar atas adalah perumahan rakyat daerah ini yang merupakan salah satu aspek budaya masyarakat Timor Timur.

In addition to the development of office buildings, the development of other facilities are also actively executed, including housing and transportation facilities to support various kinds of people's activities. Picturies illustrate the development of housing financed by House Ownership Credit from State Savings Bank; participation of the people in making development in the region a success. The picture (above) shows the housing of the people in this region that constitutes one of cultural aspects of East Timor society.





Disadari bahwa kehadiran sektor perhubungan baik darat, laut, dan udara sangat menunjang aktivitas masyarakat. Untuk itu Pemda Timor Timur telah membangun sarana transportasi laut, udara, dan darat. Dalam gambar terlihat sarana dermaga pelabuhan Dili, terminal angkutan darat Dili, dan sarana landasan pesawat Bandara Komoro Dili.

The availability of land, sea and air transportation means naturally support people's activities. Thus the Regional Administration of East Timor gives priority to build these facilities. Pictures show the pier of seaport in Dili; a terminal of land transportation in Dili; and runway facility of Komoro Airport, also in Dili.







Upaya Pemerintah Daerah Tk. I Timor Timur dalam menjamin kelancaran perhubungan antar daerah telah terlihat hasilnya dan masyarakat pun telah merasakan manfaatnya. Dalam gambar terlihat sebuah jalan mulus menuju kota Dili, dan jembatan besar sebagai penghubung.

The effort of the Regional Administration of East Timor Province to establish a fast communication among the regions has shown its result, benefitting the people in general. Pictures show a smooth road leading to Dili, and a big, connecting bridge.



Dalam upaya menggalakkan kegiatan ekspor non migas utamanya diversifikasi komoditi, daerah ini cukup potensil untuk dikembangkan. Seperti halnya kopi dari daerah ini telah diekspor. Hal ini didukung oleh kondisi alamnya, sehingga berbagai komoditi di daerah ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti terlihat dalam gambar tanaman kopi dan cengkeh tumbuh sangat menggembirakan.

To encourage the activities of non-oil-and-gas export, especially the diversification of commodities, this region is potential enough to be promoted. Coffee from this region, for instance, has already been exported. Since this province has a favourable climate, a few other commodities are able to grow well. Pictures illustrate coffee and clove cultivations, prosperously growing.





Pendidikan dipastikan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disadari oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur. Di daerah ini telah banyak dibangun sarana pendidikan baik TK, SD, SLP, SLA, dan Pendidikan Tinggi. Dalam gambar terlihat berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam sektor pendidikan antara lain berhasil dibangun Universitas Timor Timur, serta pembangunan beberapa SLP dan SLA.

Education certainly promotes the welfare of the people. Being aware of the importance of this sector, the Regional Administration of East Timor Province gives special attention to the development of education facilities such as the buildings of kindergartens, primary schools, junior high schools, senior high schools and even higher learning. Appearing on the pictures are the buildings of East Timor University and the development of junior and senior high schools.



Tabel / *Table II — 4*

REALISASI KESELURUHAN BELANJA PEMBANGUNAN SEKTOR

TOTAL REALIZATION EXPENDITURES OF EACH SECTORAL DEVELOPMENT

Sektor *Sector*	Plafond setelah Perubahan *Calling after amended*	Realisasi per 28-2-1985 */Realization as of 28-2-1985*	Prosen *Percentage*
Pertanian dan Pengairan *Agricultur and Irrigation*	Rp 4.473.327.950,-	Rp 1.373.626.709,-	30,70%
Industri/*Industry*	Rp 169.808.000,-	Rp 81.757.000,-	48,15%
Pertambangan dan Energi *Mining and Energy*	Rp 323.336.000,-	Rp 13.286.260,-	4,28%
Perhubungan dan Pariwisata *Communications and Tourism*	Rp 2.822.503.240,-	Rp 1.085.560.493,-	38,46%
Perdagangan dan Koperasi *Trade and Cooperatives*	Rp 121.755.000,-	Rp 104.549.500,-	85,87%
Tenaga Kerja dan Pemukiman Kembali *Manpower and resettlement*	Rp —	Rp —	—
Pembangunan Daerah, Desa dan Kota *Regional, Rural and City Development*	Rp 2.745.222.825,-	Rp 273.656.425,-	9,97%
Agama/*Religion*	Rp 507.753.418,10	Rp 137.701.503,50	27,12%
Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa/*Education of the younger generation, National culture, Belief in the One Almighty God*	Rp 1.506.351.660,-	Rp . 315.322.320,-	20,93%
Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan *Health, Social Welfare, Women's Role, Population*	Rp 1.832.970.280,-	Rp 679.900.475,-	37,09%
Perumahan Rakyat dan Pemukiman *Housing and Settlement*	Rp 687.081.500,-	Rp 54.152.950,-	7,88%
Hukum/*Legal Affairs*			
Keamanan dan Ketertiban Umum *Security and Public Order*	Rp 552.688.750,-	Rp 170.584.000,-	30,37%
Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial *Information, Press and Social Communication*	Rp 194.325.000,-	Rp 45.422.000,-	23,37%
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian *Science, Technology and Research*	Rp 25.000.000,-	Rp —	--
Aparatur Pemerintah *Government Apparatus*	Rp 5.988.252.193,75	Rp 1.812.506.477,50	30,27%
Pengembangan Dunia Usaha *Development of Business Atmosphere*	Rp 395.293.000,-	Rp 1.649.000,-	0,42%
Sumber Alam dan Lingkungan Hidup *Natural Resources and Living Environment*	Rp 20.000.000,-	Rp —	--
J u m l a h / *T o t a l*	Rp 22.390.668.816,85	Rp 6.149.675.113,-	27,46%

Proyek bantuan reboisasi dalam tahun 1986/1987 sebesar Rp 45.618.000,- dengan realisasi 13,8%.

Proyek pembangunan kehutanan daerah dengan dana IHH (Iuran Hasil Hutan) tahun 1981/1982 sebesar Rp 100.000.000,-, tahun 1982/1983 sebesar Rp 79.000.000,- dan dalam tahun 1983/1984 sebesar Rp 54.000.000,-

7. Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan di Propinsi Timor Timur dilaksanakan dalam tahun anggaran 1977/1978 meliputi 4 kegiatan. Yaitu pembangunan prasarana sosial, perhubungan, produksi pertanian dan pasar. Pembangunan prasarana tersebut antara lain membangun 34 Balai Desa, 157 rumah rakyat dan 4 buah Gereja. Disamping membangun 1 buah jembatan dan jalan sepanjang 5 km berikut sumur pompa sebanyak 10 buah dan membangun 2 buah pasar.

Dalam Pelita III pembangunan desa lebih digalakkan dengan dana sebesar Rp 790.000.000,-. Dilakukan berbagai kegiatan, seperti : pembangunan rumah sederhana bagi pemuka masyarakat, pembangunan balai desa, pembangunan rumah sederhana bagi anggota hansip, pembangunan rumah bagi ex anggota GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), pembangunan MCK, pengadaan alat pertanian, pengadaan bibit tanaman, alat pertukangan dan bantuan bahan untuk pembangunan tempat atau sarana peribadatan.

Di bidang perumahan sasaran pembangunan desa di Propinsi ini adalah pembangunan rumah sederhana bagi pemuka masyarakat 340 buah, berukuran 36 m² dan pembangunan rumah sederhana bagi anggota ex GPK sebanyak 800 rumah.

meters, 40 low cost houses for members of the covil defense, also of 36 square meters and 800 low cost houses for former members of ***GPK.***

In addition to the above, construction was continued on 100 village council halls, 300 units ***MCK*** *and the supply of 1500 sets of labor tools in order to meet the requirement at 150 settlements.*

The supply of agricultural equipment was in the form of hoes, chopper-knives and poles provided with hooks for harvesting. The supply of seeds: 300 tons of corn seeds, 60 tons paddy seeds and for vegetables. While building material was also privided for religious facilities in all Districts.

When entering the second year of Pelita III, the development budget reached Rp1.287.750.000,- with 12 activities, compared with only none activities in the first year of Pelita I, such as: the construction of 20 village council halls, measuring 72 square meters, 400 low cost housing, 13 medical clinics, 13 bath and washing facilities, improving the supply of clean water at 13 locations, the construction of 39 km village roads, ordinary (simple) bridges, the rehabilitation of 13 markets in 13 villages and the construction of 13 fish ponds.

With regard to improvement achieved up to the end of Pelitc III, of the 442 villages in East Timor, they can be classified as follows: 402 as self-help, 36 with auto-activity and four self-sufficient villages.

8 Agrarian Affairs

To enhance people's welfare in East Timor, the government is tackling the problem of land, its ownership and its use, land registration and survey. Topographic activities were started in three Districts, namely Liquica, Ermera and Bobonaro, which was followed by nine other Districts and land certificates were issued and distributed to those eliglibe. Since September 1981, some 189 certificates were distributed to people in Dili and other Districts.

Disamping pembangunan tadi juga dilanjutkan pembangunan 100 buah Balai Desa, 300 unit MCK dan penyediaan 1500 set alat pertukangan untuk memenuhi keperluan 150 tempat pemukiman penduduk.

Pengadaan alat-alat pertanian, diwujudkan dalam bentuk pacul, parang dan ganco. Penyediaan 300 ton bibit jagung, 60 ton bibit padi dan sayur-sayuran. Sedang pengadaan bahan-bahan bangunan untuk sarana peribadatan juga disediakan untuk seluruh Kabupaten.

Memasuki tahun ke-II Pelita III, anggaran Pembangunan Desa mencapai Rp 1.287.750.000,- dengan 12 kegiatan, dibandingkan dengan tahun pertama Pelita I hanya melaksanakan 9 kegiatan, diantaranya : Pembangunan Balai Desa sebanyak 20 buah berukuran 72 m^2, pembangunan rumah sederhana sebanyak 400 buah, pembanguna Balai pengobatan 13 buah, MC 13 buah, peningkatan dan pengadaan air bersih di 13 lokasi, pembangunan jalan desa sepanjang 39 km, pembangunan jembatan sederhana, rehabilitasi pasar umum di 13 desa, pembangunan 13 lumbung kolam ikan sebanyak 13 buah kolam.

Adapun mengenai peningkatan yang dicapai sampai akhir Pelita III dari 442 Desa di Timor Timur dapat dikatagorikan 402 Desa swadaya, 36 Desa swakarya dan 4 Desa swasembada.

8. Agraria / Pertanahan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Timor Timur, Pemerintah telah menangani masalah pertanahan, pmilikan dan penggunaannya, pendafataran (Registrasi) tanah dan survey pertanahan. Kegiatan topografi mulai dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu : Liquica, Ermera dan Babonora, yang diikuti oleh 9 Kabupaten lainnya, sertifikat tanah dibagikan kepada pemilik yang berhak. Sejak September 1981, sebanyak 189 sertifikat dibagikan kepada penduduk Dili dan Kabupaten lainnya.

Dibanding dengan waktu yang lalu, peningkatan kegiatan agraria jauh berbeda selama 450 tahun pemerintahan kolonial Portugis, hanya menyediakan 550 sertifikat tanah untuk seluruh penduduk Timor Timur. Itupun kebanyakan diberikan untuk orang kulit putih. Dalam tahun 1983/1984 Pemerintah Indonesia menambah 1000 sertifikat tanah untuk Kabupaten Amaro dan 500 untuk Kabupaten Dili. Lihat Tabel II-5.

9. Tata Guna Tanah

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pelita V dibidang Tata Guna Tanah ialah mempercepat penyelesaian Rencana Tata Guna Tanah Dati II. Untuk penyusunan tersebut diperlukan sarana peta-peta operasional meliputi :

1. Peta penggunaan tanah berskala 1 : 50.000 (1.760.000 Ha)
2. Peta kemampuan tanah skala 1 : 50.000 (830.000 Ha).
   Daerah Timor Timur yang belum dipetakan penggunaan tanahnya sebanyak 34 Blad (1.054.000 Ha) dan kemampuan tanah sebanyak 32 Blad (992.000 Ha) untuk memetakan penggunaan tanah dan kemampuan tanah diperlukan peta Topografie. Apabila peta Potografie belum ada harus dilakukan dahulu pembuatan Peta Kerja.
3. Peta penggunaan tanah detil skala 1 : 25.000 (130.000 Ha)
4. Peta penggunaan tanah kota Kabupaten/Kotip untuk 2 Kota.
5. Peta penggunaan tanah kota Kecamatan untuk 6 kota.
6. Monitoring lokasi daerah miskin untuk 13 Kabupaten.
7. Rencana tata guna tanah Dati II Daerah Tingkat II.

Sedangkan untuk Proyek Penerbitan dan peningkatan Pengurusan Hak-hak Tanah (P3HT) dengan sasaran menerbitkan 2.500 Surat Keputusan pemberian hak atas tanah di 13 Daerah Tingkat II (Kabupaten).

Proyek Pengembangan Landreforum dengan sasaran sebagai berikut:

1. Identifikasi penguasaan dan pemilikan tanah pertanian di pedesaan pada 4 Kabupaten.
2. Identifikasi tanah Negara seluas 2.750 Ha.

Proyek Pendaftaran Tanah dengan sasaran :

1. Peta dasar teknik (teristris) seluas 4.000 Ha
2. Peta Pendaftaran Tanah dan pembukaan hak seluas 6.500 Ha.

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dengan sasaran penerbitan 8.000 sertifikat hak atas tanah di 13 Kabupaten.

10. Peranan Wanita dan PKK

Peranan wanita dalam pembangunan di Propinsi Timor Timur sangat besar. Berbagai kegiatan sosial di daerah ini banyak ditangani oleh kaum wanita, baik yang tergabung dalam Dharma Wanita maupun yang tergabung dalam organisasi sosial lainnya.

Bidang pendidikan, Keluarga Berencana bahkan kegiatan-kegiatan remaja dan olahraga tidak luput dari campur tangan kaum wanita. Setelah integrasi, banyak kaum wanita yang bekerja di kantor-kantor baik swasta maupun Instansi Pemerintah.

Compared with the past, there is marked increase in agrarian activities, because the Portuguese colonial government during its 450 years in power only issued 550 land certificates for the whole population of East Timor. And notably by the white people. In 1983/1984, the government of Indonesia issued 1000 land certicates for Amaro District and 500 for Dili District. (See table II — 5)

Tabel / *Table II — 5*

PENGGUNAAN TANAH DI TIMOR TIMUR
LAND UTILIZATION IN EAST TIMOR

No	Kabupaten *District*	Sawah Irigasi *Irrigated rice field*	Tanah Tandus *Barren Land*	Perkebunan *Plantation*	Hutan *Forest*	Pemukiman *Resettlement*	Lain-lain *Other*
1.	Aileu	2.079	1.345	185	46.036	126	26.229
2.	Ainaro	3 150	25.590	4.220	49.100	4.731	77.049
3.	Ambeno	2.522	13.133	6 244	13.522	10.310	41.289
4.	Baucau	43.240	15.025	9.140	51.255	3.861	38.478
5.	Bobonaro	25.258	32.175	4.677	5.463	53.809	20 688
6.	Ovalima	12.430	60.074	3.956	30 958	311	3.825
7.	Lautem	31.076	9.790	23.624	59.588	3.244	35.235
8	Ermera	13.933	4.928	27 022	11.243	4 951	5.923
9.	Lautem	31.076	9.790	23.624	59.588	3.244	35.235
10.	Liquica	1.983	4.620	4.810	7 785	4.566	37.636
11.	Manatuto	7.562	28.792	1.479	57 340	6.840	77.427
12	Manufahi	2.501	24.209	7 148	55.464	603	23.245
13.	Viqueque	18.500	16.831	72.332	62 230	182	56.797

9. Land Use Design

*The objective in Pelita V in the sector of Land Use Design is to accelerate the completion of **Dati II** Land Use program. For this purpose is required operational maps, such as :*

1 Map of land utilization, scale 1 : 50.000 (1.760.000 Ha).
2 Map of land capability, scale 1 : 50.000 (830.000 Ha).

*Still unmapped in the East Timor area are 34 **Blad** (1. 054.000 Ha) of land utilization and 32 **Blad** (992.000 Ha) of land capability And a topographic map is required to determine land use design and land capability. In the absence of a topographic map, a working map should be prepared.*

3 A detailed land utilization map, scale 1 : 25.000 (130.000 Ha)
4 A map of land utilization in the city of a District/Municipality, for two cities.
5 A map of land utilization in the city of a Sub-district for six cities.
6 The monitoring of location of poor areas for 13 Districts.
*7 Land use design for three **DATI II.***

*While for the Project of Arranging and Enhancing of Land Titles Management **(P3HT)**, the objective is to issue 2.500 certificates on land in 13 Districts **(Dati II)**.*

The project of landreform development has the following objectives :
1 the identification of control and ownership of agricultural land in rural area in four Districts.
2 the identification of State owned land, an area of 2.750 Ha.

The project of Land Registration with the objectives:
3 a technical basic map (teristris), an area of 4.000 Ha.
2 a map of land registration and he right of opening land, an area of 6.500 Ha.

*The Project of Agrarian National Operation **(PRONA)** with the objective of issuing 8.000 certificates of titles on land in 13 Districts.*

10. The role of woman and PKK (Family Welfare Promotion)

Women have a major role in the development of East Timor Province. Various social activities in this area are carried out by women, both in connection with Dharma Wanita (organization for wives of civil servants) as well as other social organizations. Women are even active in education, family planning, youth activities and sport. After integration, many women work in government offices as well as with the private sector.

B A B / *CHAPTER III*

LIMA SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR
FIVE PRIORITY SCALES OF EAST TIMOR'S DEVELOPMENT

PEMBANGUNAN Daerah Timor Timur diarahkan pada usaha pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pemantapan stabilitas yang dinamis. Disamping itu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan terus dikembangkan, sehingga masyarakat dapat berdiri sendiri dengan pembinaan bimbingan pemerintah.

Agar program pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, disusun strategi dan kebijaksanaan Repelita Daerah. Dalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan Repelita Daerah, perhatian diberikan pada sektor-sektor strategis yang dapat mempercepat laju pertumbuhan, keserasian, keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Disamping strategi dan kebijaksanaan sektoral, diperhatikan pula strategi dan kebijaksanaan **spatial** yang akan memelihara keseimbangan pembangunan diantara berbagai wilayah pembangunan.

Propinsi Timor Timur memiliki lima sektor prioritas yang sekaligus merupakan lima sektor strategis. Sektor tersebut seperti diuraikan dimuka terdiri : sektor **pertanian,** sektor **pendidikan,** sektor **kesehatan,** sektor **perhubungan** dan sektor **aparatur pemerintah.**

Ada empat wilayah pengembangan di Timor Timur. Yaitu wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan di Dili, wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan di Ainaro, wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan di Baucau dan wilayah pengembangan IV dengan pusat pengembangan di Pante Makasar.

Untuk mencapai tujuan pembangunan berupa perbaikan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dalam suasana keamanan yang stabil dan dinamis, strategi pembangunan daerah Timor Timur ditujukan pada pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah pembangunan. Hal itu akan dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan penduduk yang didukung oleh pembangunan sektor pertanian dan sektor perhubungan termasuk aparatur pemerintah yang cukup dalam kualitas maupun kuantitas.

Faktor kunci pembangunan daerah ini adalah manusia-manusia yang terlibat dalam proses pembangunan. Disamping sumber-daya alam, modal, teknologi dan sistem sosial. Karena modal dan teknologi merupakan faktor produksi yang dapat didatangkan dari luar daerah, sedangkan tenaga kerja/penduduk dan sumber-daya alam adalah faktor produksi yang sudah tersedia di daerah, maka pengelolaan sumber-daya manusia dan sumber-daya alam diusahakan terlebih dahulu.

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, memiliki kreativitas, produktif, terampil, cakap dan bertanggung jawab dalam mengolah dan mendayagunakan sumber-daya alam.

Atas dasar kerangka pemikiran tadi, strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah Daerah ditetapkan seperti berikut :

1. Pertanian

Di sektor pertanian pembangunan dititikberatkan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sedang pembangunan di sektor pengairan dan pengairan diarahkan untuk menunjang pembangunan pertanian melalui prasarana pengadaan air, pengamanan, perbaikan aliran sungai, penelitian dan study perencanaan pengembangan sumber-sumber air.

2. Perhubungan

Di sektor ini diusahakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan secara meluas dan merata untuk membuka daerah-daerah yang terisolir dan memperlancar arus penumpang, barang dan jasa ke seluruh wilayah.

3. Kesehatan

Meningkatkan pealyanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat secara serasi demi terciptanya derajad pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh rakyat. Dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pemulihan kesehatan dan penyembuhan serta pencegahan penyakit.

THE DEVELOPMENT of East Timor is directed at economic growth, equitable distribution of development and its gains as well as consolidation of dynamic stability. Furthermore, to enhance the community's ability in continuing development and to become self-reliant under the government's counsel and guidance.

In order to secure an effective and efficient implementation of a Region's development program, it is necessary to have a strategy and policy for a Region's Repelita. In formulating the strategy and policy of a Region's Repelita, attention shall be given to strategic sectors which can accelerate growth rate, harmony, balance and equitable distribution of development. In addition to sectoral strategy and policy, attention should also be given to spatial strategy and policy in order to maintain a balance of development among the various areas.

The East Timor Province has five priority sectors which at the same time constitute five strategic sectors. As described earlier, the sectors dealt with: ***agriculture, education, forestry, communication*** *and* ***government apparatus.***

East Timor has four areas of development, namely development area I with Dili as the centre of development, development area II with Ainaro as centre, development area III with Baucau and development area IV with Pante Makasar as the centre of development.

To reach development targets which is a just and equitable distribution of improved people welfare in a stable and dynamic peaceful situation, the strategy of East Timor's regional development is directed at economic growth that is reflected in increased community's income, equitable distribution of development and its gains in the whole area of development. This can be achieved by improving education and public health, supported by development in the sectors of agriculture and communication, including a government apparatus which is sufficient in quality and quantity.

The key factor of development in this area is the people involved in the development process, in addition to natural resources, capital, technology and social system. Whereas capital and technology are production factors which can be derived from outsie the area, while manpower/people and natural resources are production factors already available in the area, priority will be given to managing human and natural resources.

The training and management of human resources are hoped to produce a development man who can be self-reliant, creative, productive, skilled, capable and has responsibility in managing and utilizing natural resources.

Based on above framework of thinking, the strategy and policy of the Regional Government are established as follows:

1. Agriculture

Emphasis on development in the agricultural sector is to step up the production of food crops, plantation, animal husbandry and fishery. While water resources development aims at supporting the agricultural sector through water supply infrastructure, protection, improvement of river flow, research and study of water resources development plans.

2. Communication

Development in this sector will include construction, repair and maintenance of communication's infrastructure and facilities, to be overall and evenly distributed, in order to open isolated areas and to accelerate the flow of passengers, goods and services to all parts of the area.

3. Health

Improvement of a harmonious public health service and extension for the sake of creating an appropriate level of health service to the whole people. This will be carried out through efforts of improvements, convalescence and cure as well as prevention of diseases.

4. Education

In meeting the basic needs of citizens within and outside the school, accent in the educational sector is on basic education. In the field of education within the schools, there in increased expansion and a better spread of opportunities to obtain education through the ***"WAJAR"*** *(compulsory education) program for school age children. Furthermore, in line with the Government's policy, priority is given to the type of vocational schools. Especially, those which support development of the area's potential in the sectors of*

4. Pendidikan

Pemenuhan keperluan dasar warga negara di dalam dan di luar sekolah, dititikberatkan pada bidang pendidikan dasar. Di bidang pendidikan di dalam sekolah ditingkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan melalui program "WAJAR" (wajib belajar) bagi anak usia sekolah. Disamping itu, sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah, jenis sekolah kejuruan lebih diutamakan. Terutama yang menunjang pengembangan potensi daerah di bidang pertanian dan industri dasar.
Adapun pendidikan di luar sekolah diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemberantasan 3 buta (aksara latin, bahasa Indonesia dan pengetahuan dasar) dan peningkatan fasilitas belajar-mengajar, pemenuhan dan penambahan latihan ketrampilan melalui program kerja.

5. Aparatur Pemerintah

Di bidang ini pembangunan sarana dan prasarana fisik pemerintahan dan peningkatan kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan mendapatkan penekanan khusus. Pelaksanaan pembangunan diarahkan pada usaha pengembangan dan pendewasaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat Daerah Tingkat II.

Namun demikian ini tidak berarti mengenyampingkan arti penting sektor-sektor lain yang tidak disebutkan di atas. Sebab sektor-sektor lain tetap merupakan sektor penunjang yang menentukan keberhasilan pembangunan 5 sektor prioritas. Pada gilirannya menentukan pula keberhasilan pembangunan secara keseluruhan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur.

Perlu pula kiranya dicatat bahwa Propinsi Timor Timur baru mulai membangun dengan tahapan Pelita sejak periode tahun 1979/1980 - tahun 1983/1984. Ini disebabkan biaya-biaya pembangunan sebelumnya lebih diarahkan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang timbul sebagai akibat perang saudara menjelang Integrasi.

1. Pertanian dan Pengairan

Struktur perekonomian Propinsi Timor Timur bercorak pertanian. Ini terbukti sebagian besar (95%) penduduk bekerja di sektor pertanian dan mengandalkan kehidupannya pada kegiatan tersebut. Beberapa kegiatan pertanian yang menonjol di wilayah ini adalah tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dalam tahun 1983 tercatat sebanyak 114.049 KK (Kepala Keluarga) petani, sebagian besar diantaranya masih mengusahakan kegiatan usaha taninya secara sederhana dan tradisional. Melihat kenyataan ini tepatlah kalau sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan.

a. Tanaman Pangan

Luas areal Tanaman Pangan Propinsi Timor Timur keseluruhan adalah 409.332 Ha atau 28% dari luas wilayah Timor Timur.

Keadaan tanah pertanian di Timor Timur mempunyai jenis tanah yang bervariasi untuk tiap-tiap daerah. Jenis tanah alluvial dengan solum cukup dapat dijumpai di bagian Timur Los Palos atau sekitar danau Ira Laloro, dataran rendah Namura di Maliana dan disepanjang pantai Utara dan Selatan. Kadar N rendah dengan unsur P dan K berkisar sedang dan tinggi.

Disepanjang lereng dataran tinggi Nori dan dataran Baucau dijumpai jenis tanah Renzina dengan solum dangkal, struktur tanah baik dengan kadar N rendah sampai sedang unsur P dan K pada lapisan atas berkisar sedang sampai tinggi.

Jenis tanah mediteran dengan solum cukup dalam, struktur tanah rendah dengan lapisan bagian bawah agak padat dan permukaan tanah yang padat, dijumpai disebagian dataran Los Palos dan daerah perbukitan Maliana.

Jenis tanah lithosal merupakan jenis tanah dengan tingkat erosinya besar terdapat pada lereng-lereng bukit dan gunung yang vegetasinya jarang dan gundul sehingga bahan induknya nampak menonjol ke permukaan.

Sedangkan jenis tanah "Brown Forest Soil" (BFS) dengan solum sedang, tekstur lempung dan reaksi tanah masam penyebarannya di daerah pegunungan Ermera.

Dari jenis-jenis tanah tersebut cukup mempunyai potensi untuk pengembangan pola pertanaman pangan.

Tingkat produktifitas dari seluruh komoditi pangan masih rendah sebagai akibat dari tingkat penguasaan teknologi yang masih sederhana, serta belum seluruhnya lahan Pertanian Tanaman Pangan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan belum dapat ditanggulangi oleh Timor Timur sendiri.

Untuk mencapai pemenuhan pangan sendiri (Swasembada) inilah Pemerintah Daerah Timor Timur melalui instansi-instansi teknis antara

agriculture and basic industries. With regard to education outside the schools, it is aimed at improving the implementation of eradicating the three 'blinds' related to Roman characters, the bahasa Indonesia and basic knowledge, and improving facilities of learning-teaching, meeting the need of and adding skilled training through work programs.

In this sector, special attention is given to develop physical facilities and infrastructure of administration and to improve the ability of the apparatus in performing the Administration. Implementation is aimed at efforts to develop and to achieve maturity of regional autonomy which is real, dynamic and responsible with emphasis on ***DATI II.***

5. Government Apparatus

Nevertheless, it doesn't mean neglecting the importance of the other sectors not mentioned above. Because other sectors remain supporting sectors which determine the success of development in the five priority sectors. And in turn, they also determine the overall success of development which is carried out by the Provincial Givernment of East Timor.

It should also be noted that development in the Province of East Timor did not start until the Pelita period of 1979/1980 — 1983/1984. The reason was that prior to that period, funds for development were more aimed at overcoming various problems as a result of civil war preceeding integration.

1. Agriculture and Irrigation

The economic structure of East Timor Province is agricultural in character. This is evident from the majority (95%) of the population active in the agricultural sector which constitutes their primary source of income. Several noticeable agricultural activities in this area are food crops, plantations, animal husbandry and fishery.

In 1983, there were 114.049 farmers' heads of families, most of them carrying out farm operations in a simple and traditional way. Therefore, it is appropriate to consider this agricultural sector as very strategic for development.

a. Food Crops

The total area food crops in East Timor Province is 409.332 Ha or 28% of the whole area of East Timor. The condition of agricultural land in East Timor is such, that soil type varies in each area. Alluvial soil with sufficient solum can be found east of Los Palos or around lake Ira Laloro, the lowland of Namura in Maliana and along the North and South coast. The N—content is low and the elements of P and K between moderate and high.

Along the slopes of Nori highland and the plains of Baucau, there is Renzina-type soil with shallow solum, good structure of soil with N-content from low to moderate, while the elements P and K at the upper level between moderate and high.

Mediteran-type soil with sufficient deep solum, low structure of land with lower part of layer rather solid and solid earth surface, can be found in part of Los Palos plains and Maliana mountainous area.

Lithosal-type soil has a high degree of erosian and can be found at the slopes of hill and mountain with sparse vegetation and bare so that the parent material can be seen protruding to the surface.

While Brown Forest Soil (BFS)-type with moderate solum, clay texture and soil with acid reaction can be found scattered in the Ermera mountains.

The above mentioned types have sufficient potentials for developing food crops design.

The productivity level of all the food commodities is still low because the degree of technology in command is yet very moderate, and that not all available agricultural land for food crop have been utilized in the best way. Therefore, East Timor is not yet able to overcome all requirements for food stuff.

In order to achieve self-sufficiency that the Government of East Timor through other technical services, such as: the Department of Public Works ***(DPU),*** *the section in charge of irrigation infrastructure, the Agricultural Service in charge of Food Crops, provides guidance in agricultural technology.*

In East Timor, agricultural development of food crops in carried out with emphasis on the following:

1 an integrated production growth and enhancement through efforts, such as intensification, extensification, diversification and rehabilitation.
2 to create a climate and opportunity which stimulate participation of all layers of farmers' community as well as investors in increasing production.
3 to realize development facilities and infrastructure for food crop agriculture which can assure a continuous development and application of advanced technology.

In 1980, the acreage of rice fields reached 166.238 Ha, consisting of 50% simple irrigated fields and 50% of rain-fed rice field. While the acreage for ***padi gogo*** *(rice grown on dry fields) was about 1.665 Ha., secondary crops*

lain : Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Bidang Pengairan yang mengatur prasarana irigasi, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang membina dalam teknologi pertanian.

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Timor Timur dititik beratkan kepada :

1. Pertumbuhan dan Peningkatan Produksi secara terpadu melalui usaha-usaha Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi.
2. Menciptakan iklim dan kesempatan yang merangsang partisipasi seluruh lapisan masyarakat petani maupun penanaman modal dalam peningkatan produksi.
3. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang dapat menjamin pengembangan dan pengetrapan teknologi maju yang berkesinambungan.

Areal persawahan di tahun 1980 mencapai 166.238 Ha, terdiri dari 50% pengairan sawah sederhana dan 50% sawah tadah hujan. Sementara luas areal tanaman padi gogo sekitar 1.665 Ha, palawija 77.685 Ha. Dari luas areal pertanian itu, baru sekitar 15.000 Ha atau 9% dari seluruh areal yang telah digarap.

Tingkat produksi tanaman pangan Padi tahun 1978 sebesar 22.306 ton, dalam tahun 1979 sebanyak 26.505,08 ton, meningkat dalam tahun 1980 menjadi 27.143,47 ton, tahun 1981 sebanyak 28.183,23 ton, tahun 1982 sebanyak 29.771 ton, tahun 1983 sebanyak 31.663 ton, tahun 1984 sebesar 35.249 ton dan tahun 1985 menjadi 37.882,58 ton.

Produksi tanaman jagung tahun 1979 sebanyak 31.360,12 ton, tahun 1980 meningkat menjadi 32.674,5 ton, tahun 1981 sebanyak 33.989,15 ton, tahun 1982 sebanyak 37.826,50 ton dan dalam tahun 1983 sebanyak 42.096 ton, tahun 1984 44.472 ton dan dalam tahun 1985 menjadi 46.848,25 ton.

Daerah-daerah yang terbilang surplus dengan produksi jagung adalah Kabupaten Bobonaro 5.166 ton, Suai 2.753 ton dan Ambenu sebanyak 4.120 ton. Untuk mengetahui tingkat produksi tanaman pangan dari tahun 1978 hingga tahun 1985 Lihat Tabel III — 1.

77.685 Ha. From the agriculture acreage, only about 15.000 Ha or nine precent of the total area have been under cultivation.

Rice production in 1976 was 22.306 tons, in 1979 it was 26.505,08 tons, increased in 1980 to 27.143,47 tons, in 1981 it was 28.183,23 tons, in 1982 it became 29.771 tons, in 1983 it was 31.663 tons, in 1984 reaching 35.349 tons and in 1985 it was 37.882,58 tons.

Corn production in 1979 was 31.360,12 tons, in 1980 increased to 32.674,5 tons, in 1981: 33.989,15 tons, in 1982: 37.826,50 tons, in 1983: 42.096 tons, in 1984: 44.472 tons and reaching 46.848,25 tons in 1985.

Areas with surplus production of corn are the District of Bobonaro, 5.165 tons, Suai 2.735 tons and Ambeno 4.120 tons.

To have a picture on the level of food crops production from 1978 up to 1985, see Table III — 1

In addition to the production of food crops, the production of vegetables also increased. In 1980, the production of potatoes reached 170 tons, cabbage 23 tons, mustard greens 24 tons, red pepper 269 tons, red onions 413 tons, white onions 69 tons, tomatoes 408 tons and string beans 582 tons.

Meanwhile, the acreage for secondary crops is as follows: sweet potatoes in 1979: 960 Ha, in 1980:L 3.043 Ha, in 1980 increased to 3.043 Ha, in 1981: 4.200 Ha, in 1982: 4.060 Ha and in 1983 it was 5.849 Ha, an average growth annually of 68,25%.

Soybean acreage in 1979 reached 768 Ha, in 1980: 1.370 Ha, in 1981: 1.694 Ha, in 1982: 1.847 Ha, and in 1983 reached 2.558 Ha. an average growth of 31.11%. Table III — 2 illustrates the acreage of food crops between 1979 and 1983.

b. Plantation

This province belongs to an area with sufficient great potentials for plantation (estate), especially for coffee and coconut cultivation. Other crops such as cinnamon, candlenut three, rubber, clove, peper and tea, are still is small quantities. Furthermore, this area is a producer of high quality coffee and known in the international market. Potential areas for development as plantation areas are the Districts of Ermera, Liquica, Aileu and Same.

Tabel / ***Table III — 1***

PRODUKSI TANAMAN PANGAN 1978 — 1985 (Dalam Ton)
PRODUCTION OF FOOD CROPS, 1978 — 1985 (in tons)

No.	Komoditi *Commodity*	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1.	Padi *Paddy*	22.306	26 505,08	27.143,47	28.183,23	29.771	31.663	35.249	37.882,58
2.	Jagung *Corn*	27.654	31.360,12	32.674,5	33.989,80		42.096	44.472	46.848,25
3.	Kacang hijau *Small green peas*	121,7	138,18	202,44	334	677	1.374	1.539	1.723,81
4.	Kacang Kedele *Soybean*	41	44,25	45,31	46,10	48,7	50,95	54,48	59,28
5.	Kacang Tanah *Peanut*	579	636,45	756,71	898,42	1.068,12	1.351,21	1.409,32	1.409,49
6.	Ubi Jalar *Sweet potato*	2.261	2.467,13	3.202,84	4.158,34		5.838,17	8.093,24	9.666,23
	Ubi Kayu *Cassava*	21.634	24.698,32	25.985,18	28.116,30	30.152,20	31.303,76	35.295,81	39.795,12
8.	Sayur-sayuran *Vegetatoes*	8.513,38	10.191,74	11.470,10	12.839,91	14.618,92	15.007,36	15.405,46	16.740,26

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Pertanian, Propinsi Timor Timur
Source : Regional Office, Department of Agricultural, East Timor Province.

Disamping produksi tanaman pangan, produksi sayur-sayuran juga meningkat. Dalam tahun 1980 produksi kentang mencapai 170 ton, kubis 23 ton, sawi 24 ton, lombok 269 ton, bawang merah 413, bawang putih 69 ton, tomat 408 ton dan kacang panjang 582 ton.

Sementara untuk luas areal tanaman pangan seperti, ubi jalar dalam tahun 1979 seluas 960 Ha, tahun 1980 meningkat jadi 3.043 Ha, tahun 1979 seluas 4.200 Ha, tahun 1982 seluas 4.060 Ha dan dalam tahun 1983 menjadi 5.849 dengan rata-rata pertumbuhan 68,25% tiap tahunnya.

Kacang kedele luas areal tahun 1979 seluas 768 Ha, tahun 1980 seluas 1.370 Ha, tahun 1981 seluas 1.694 Ha, tahun 1982 seluas 1.847 Ha dan dalam tahun 1983 mencapai luas 2.558 Ha. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31.11%. Untuk jelasnya mengenai uraian luas areal tanaman pangan tahun 1979 hingga tahun 1983 (Lihat Tabel III - 2).

In 1982, the acreage of people's plantation in East Timor for various commodities gave the following situation: coffe, an area of 44.560 Ha producing 9.010 tons: coconuts in an area of 47.715 Ha, cinnamon 2.517 Ha; kapok 8.569,75 Ha; areca nut 34.690,14 Ha and cloves in an area of 59 Ha. While in 1983, there were 33.488 Heads of Families (KK) of coffee farmers.

In 1978, coconut production was 189.25 (kg/Ha), in 1979: 196,75 (Kg/Ha), in 1980: 196,02 (Kg/Ha), in 1981: 195,97 (Kg/Ha); in 1982: 193,24 (Kg/Ha); in 1983: 168,20 (Kg/Ha); in 1984: 171,16 (Kg/Ha) and in 1985 it was 172,92 (Kg/Ha).

Coffee production in 1978 was 95,18 Kg/Ha; in 1979: 97.62 Kg/Ha; in 1980: 136,68 Kg/Ha; in 1982: 135,61 Kg/Ha; in 1983: 156,47 Kg/Ha; in 1984: 164,23 Kg/Ha and in 1985 it was 169,84 Kg/Ha.

b. Perkebunan

Propinsi ini termasuk daerah yang memiliki potensi perkebunan cukup besar, terutama budidaya kopi dan kelapa. Untuk tanaman lain seperti kayu manis, kemiri, karet, cengkeh, lada dan teh masih dalam jumlah kecil. Selain itu daerah ini merupakan penghasil kopi kualitas tinggi dan dikenal di pasaran Internasional. Daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan adalah Kabupaten Ermera, Liquica, Aileu dan Same.

Luas areal perkebunan rakyat di Timor Timur dalam tahun 1982 meliputi komoditi kopi seluas 44.560 Ha dengan produksi 2.517 Ha, kapok 8.569,75 Ha, pinang 34.690, 14 Ha dan areal perkebunan cengkeh seluas 59 Ha. Sedangkan dalam tahun 1983, jumlah Kepala keluarga petani kopi berjumlah 33.488 KK.

Tahun 1978 produksi kelapa sebanyak 189,25 (Kg/Ha), tahun 1979 sebanyak 196,75 (Kg/Ha), tahun 1980 sebanyak 196,02 (Kg/Ha), tahun 1981 sebanyak 195,97 (Kg/Ha), tahun 1982 sebanyak 193,24 (Kg/Ha), tahun 1983 sebanyak 168,20 (Kg/Ha), tahun 1984 sebanyak 171,16 (Kg/Ha) dan dalam tahun 1985 sebanyak 172,92 (Kg/Ha).

Komoditi kopi dalam tahun 1978 (98,18 Kg/Ha), tahun 1979 (97,62 Kg/Ha), tahun 1980 (136,68 Kg/Ha), tahun 1982 (135,61 Kg/Ha), tahun 1983 (156,47 Kg/Ha), tahun 1983 (156,47 Kg/Ha), tahun 1984 (164,23 Kg/Ha), tahun 1985 (169,84 Kg/Ha).

Keadaan Umum Sub Sektor Perkebunan

1. Dalam bidang perkebunan maka komoditi yang menonjol yakni : kopi, kelapa, kemiri, yang merupakan komoditi potensial dan komoditi sosial pada Kabupaten : Ermera, Baucau, Liquisa, Bobonaro dan Same, disamping komoditi utama tersebut maka terdapat komoditi pembinaan yang meliputi : Pinang, kapak dan kayu manis yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten di Propinsi Timor Timur demikian juga dalam rangka Diversifikasi lahan telah diintrodusir bibit komoditi perkebunan rakyat antara lain : Cengkeh, Vanilia, Kelapa Dalam, Kelapa Hybrida, Coklat dan Lada demikian juga Tebu telah mulai dikembangkan.
2. Pengusaha tanaman Perkebunan di Propinsi Timor Timur sepenuhnya masih diusahakan oleh rakyat dimana dari luas lahan Perkebunan seluas ± 142.000 Ha atau sebanyak 87,19% diusahakan oleh rakyat sedangkan sisanya sebesar ± 12,81% diusahakan oleh pihak swasta, namun pengusaha perkebunan oleh swasta sampai dengan saat ini masih 1 (satu) perusahaan yang menangani perkebunan, disamping hal tersebut maka guna menunjang pelaksana peningkatan produksi Perkebunan khususnya komoditi kopi maka berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur Nomor 523 Tahun 1983, Dinas Perkebunan telah ditugaskan untuk mengadakan Kebun Kopi eks pemerintahan Portugis seluas ± 606,25 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ermera, Liquisa, Ainaro dan Same demikian pula untuk tanaman kelapa seluas 23 Ha yang berada di Kabupaten Liquisa, Bobonaro dan Baucau.
3. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan Perkebunan maka dalam waktu relatif singkat pertumbuhan pelaksanaan peningkatan produksi dan peremajaan/rehabilitasi telah menunjukkan hasil dimana dalam 2 tahun terakhir ini peningkatan pengembangan tanaman rata-rata mencapai 15,12% per tahun peningkatan produksi dicapai peningkatan rata-rata 7,23% per tahun.
4. Sebagaimana disampaikan bahwa pengusahaan tanaman perkebunan rakyat di Propinsi Timor Timur masih diusahakan secara tradisional baik sistem kultur teknis maupun pengelolaan usaha taninya dan pengolahannya, demikian juga penggunaan pupuk dan obat-obatan belum banyak dikenal dan dipergunakan oleh petani untuk itu maka secara bertahap telah dikenalkan cara-cara penggunaan pupuk dan pestisida dalam rangka usaha peningkatan produksi perkebunan dengan cara pembuatan kebun-kebun percontohan.

   Demikian juga pengusaha lahan perkebunan rakyat banyak diusahakan pada lahan-lahan dengan kemiringan 10 - 30% bahkan sampai dengan curam juga keadaan produktifitas tanah yang rendah disamping daging tanah yang tipis yang dijadikan permasalahan pokok dalam usaha pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Timor Timur antara lain :
   a. Tidak teraturnya keadaan pupuk, teknis/tata kebun petani.
   b. Semakin tuanya tanaman perkebunan rakyat.
   c. Setiap saat adanya gangguan yang disebabkan adanya bencana alam/kebakaran.
   d. Belum berorientasinya petani dalam pengetrapan pasca panen perkebunan dan pemasukan hasil produksi.
5. Walaupun secara umum telah disampaikan bahwa keadaan di Propinsi Timor Timur mempunyai lahan yang memungkinkan guna pengembangan komoditi tanaman perkebunan maka faktor penentu yang menjadikan hambatan dalam pengembangan komoditi tanam-

Tabel / *Table III — 2*

PERKEMBANGAN LUAS AREAL KOMODITI TANAMAN PANGAN DI PROPINSI DATI I TIMOR TIMUR, TAHUN 1979 s/d 1983 (Dalam Ha)

DEVELOPMENT OF ACREAGE OF FOOD CROP COMMODITIES IN EAST TIMOR PROVINCE, 1979 UP TO 1983 (in Ha)

No.	Komoditi *Commodity*	1979	1980	1981	1982	1983	Rata-rata pertumbuhan/th (%) *Average annual growth (%)*
1.	Padi *Paddy*	17.957	14.646	18.914	17.827	17.882	- 0,11
2.	Jagung *Corn*	52.267	51.305	67.453	73.449	29.305	- 13,77
3.	K Hijau *Small green peas*	3.200	982	705	313	1.618	- 14,81
4.	K Kedele *Soybean*	768	1.370	1.694	1.847	2.558	31,11
5.	K Tanah *Peanut*	209	123	166	182	5.560	88,22
6.	Ubi Kayu *Cassava*	26.950	11.758	12.685	11.597	9.948	- 18,79
7.	Ubi Jalar *Sweet potato*	960	3.403	4.200	4.060	5.849	68,24

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur.
Perkembangan Pelita III dan Proyeksi Repelita IV Sektor Pertanian Timor Timur

Source : Regional Office, Department of Agriculture, East Timor Province. Development of Pelita III and Projection of Repelita IV, Agricultural Sector of East Timor.

General Condition of Sub-sector Agricultural

*1 In the plantation sector, prominent among the commodities are coffee, coconut, candlenut, which constitute potential as well as social commodities for the Districts of: Ermera, Baucau, Liquisa, Bobonaro and Same. In addition to these major commodities, are commodities under guidance such as: areca, kapok and cinnamon, scattered in almost all Districts of East Timor Province. Also, within the framework of soil diversification, seedlings for peoples's plantation have been introduced, such as: cloves, vanilla, **Kelapa Dalam**, Hybridcoconut, cacao and pepper. Also, a start was made with developing sugar cane.*

2 In East Timor Province, activities on plantation crops are still in the hands of the people, utilizing about 142.000 Ha or about 87.19% of the available plantation land, while the balance of 12.81% is exploited by the private sector, notably by only one provate enterpreneur active in plantation crop.
In an effort to support the implementation of raising the production of plantation crop, especially coffee, based on the Decision of the Governor of East Timor No 523 of 1983, the Plantation Service is assigned to manage the coffee plantation of the former Portuguese governmont, an area of about 606,25 Ha, scattered in the Districts of Ermera, Liquisa, Ainaro and Same, also coconut, covering an area of 23 Ha in the Districts of Liquisa, Bobonaro and Baucau.

3 Within the scope of supporting the success of plantation development, in a relative short time efforts showed results in expansion, production increase, rejunevation/rehabilitation; in the last two years, crop development reached an average increase of 15,12% annually, while for production, the average annual increase was 7,23%.

4 As mentioned, people's activities in East Timor Province on plantation cropsare still in a traditional way, both culturo technical as well as farming management. Also, the use of fertilizers is not yet wideiy known. And the same is true with the use of fertilizers and pesticides is introduced within the scope of raising plantation production by making model plantations. Much of the land for peoples's plantation are utilized at a slant of 10 — 30% and even steeper.
In addition to the low productivity of the land and the thin topsol, major problems in efforts to develop the Sub-sector of Plantation in East Timor are among other :
a the irregular condition of fertilizer, farming technics/methods.
b the aging of people's plantation crops.
c natural diaster/fire which can occur any time and as such constituting an obstacle.
d the farmers are not yet familiar with post harvest plantation and income from production.

5 Although mentioned generally that the soil condition in East Timor opens possibilities to develop plantation crops commodities, there are factors which consitute constraints in developing those commodities, such as :
a farmers still lack capital in exploiting their farm.
b insufficient knowledge and skill of the farmers in applying appropriate technology.

an perkebunan antara lain :

a. Masih kurangnya modal petani pekebun dalam mengelola usaha taninya.
b. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengetrapan teknologi tepat guna.
c. Belum adanya sumber benih yang ada di wilayah Propinsi Timor Timur sehingga setiap saat akan mengusahakan pengembangan harus melakukan introduksi benih.
d. Hubungan jalan yang masih kurang serta pemukiman penduduk yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan penyuluhan/pembinaan.
e. Masih kurangnya sarana mobilitas tenaga operasional penyuluhan pada Sub Sektor Perkebunan.
f. Belum berorientasinya petani terhadap pasar atau pemasaran hasil produksi.

Potensi komoditi Perkebunan yang dapat dikembangkan di daerah Timor Timur adalah : kopi, kelapa, kemiri, asam, karet, kayu manis, lada dan tembakau. Lihat Tabel III-3.

Di Lospalos dan Maliana sejak tahun 1978 dibangun pembibitan tanaman perkebunan dan sampai sekarang disemai 1.000.000 pohon kopi dan 1.000.000 pohon cengkeh serta 59.200 pohon kelapa. Hasil persemaian disebarluaskan kepada para petani. Selain itu di Kabupaten Lautem dan Viqueque, dilakukan percobaan pembibitan tebu. Di kedua Kabupaten tersebut akan dibuka areal perkebunan tebu seluas 10. 000 Ha yang hasilnya disalurkan ke pabrik gula di Lospalos.

Luas areal perkebunan rakyat di Timor Timur tahun 1985 meliputi areal perkebunan kopi seluas 48.698 Ha dengan produksi rata-rata 169,84 Kg/Ha; areal perkebunan kelapa 48.151,60 Ha; perkebunan kayu manis 2.604,47 Ha; perkebunan kapok 9.578,21 Ha; perkebunan pinang 35,307 Ha; dan areal perkebunan cengkeh 1.042,5 Ha. Dalam waktu dekat cengkeh termasuk tanaman perkebunan yang cukup berperan di Timor Timur.

Dalam Pelita IV (1984/85 - 1988/89), luas areal perkebunan dikembangkan mencapai 156.637 Ha, dengan target peningkatan 2,7 % per tahun. Dalam tahun 1985 luas perkebunan mencapai 149.420 Ha. Sehingga sampai akhir Pelita IV (1989) akan terjadi peningkatan seluas 7.217 Ha.

Sementara jumlah kopi yang diekspor ada kecenderungan meningkat tiap tahunnya. Dalam tahun 1979 kopi yang diekspor sebanyak 2.510 ton. Sedang di tahun 1983 meningkat menjadi 5.505 ton. Berarti meningkat 21,69% per tahun. Lihat Tabel III-4.

Sedang pendapatan daerah ini yang berasal dari ekspor kopi, selama 4 tahun terakhir (tahun 1980-1983) atas dasar harga pasar Dili tahun 1983 mencapai sebesar Rp 1,7 milyar pertahun.

c. *Peternakan.*

Daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai areal peternakan. Menurut perkiraan areal seluas 148.436 Ha atau 9,1 % dari luas dataran wilayah ini sangat ideal dijadikan areal penggembalaan ternak. Sebelum tahun 1974 propinsi ini merupakan gudang ternak. Namun populasi ternak menurun secara drastis yang disebabkan berbagai faktor. Untuk mengembalikan peranannya sebagai gudang ternak, diambil beberapa langkah pengembangan.

Seperti pengadaan bibit ternak, penyiapan lapangan rumput dan ketrampilan para peternak. Untuk itu Pemerintah mendatangkan berbagai jenis ternak antara lain 4.512 sapi Bali, 1500 ekor sapi unggul luar negeri dan 2.800 ekor kerbau. Selain itu menerima bantuan dari berbagai organisasi swasta. Seperti dari PMI 9.700 ekor ayam, 950 ekor itik dan 2000 bibit ikan nilam. Sedangkan dari CRS (Catholide Relief Service) memperoleh 300 ekor sapi Bali dan disebarkan kepada para peternak, khususnya di Raimate.

Kabupaten Bobonaro dijadikan pilot project di sub sektor Peternakan. Di pilot project ini, populasi sapi bantuan Presiden berkembang 100% dari tahun 1978/1979 sampai tahun 1982/1983. Sapi yang diserahkan di tahun 1978/1979 sebanyak 1500 ekor, kemudian berkembang menjadi 3.823 ekor di tahun 1982/1983.

Perkembangan populasi ternak di Timor Timur menunjukkan prospek yang cerah. Dalam tahun 1983 populasi ternak terdiri 39.705 ekor sapi (400 ekor merupakan sapi perah), 40.229 ekor kerbau, 21.584 ekor kuda, 202.242 ekor babi, 74.062 ekor kambing, 17.751 ekor domba dan 314.835 ekor ayam. Dalam tahun 1985 populasi ternak tersebut 49.761 sapi (400 ekor merupakan sapi perah), 35.185 kerbau, 23.360 kuda, 182.383 babi, 73.921 kambing dan 27.536 domba.

Produksi daging dan telur mengalami pertumbuhan rata-rata 4,02% dan 1,66% setahun. Meningkatnya pertumbuhan daging dan telur sebagai akibat tingginya jumlah pemotongan ternak dan pertambahan populasi ayam dan itik. Penyebaran populasi ternak kecil yang terdiri dari babi (29,4%) dan kambing (36,4%) terbesar di Kabupaten Dili.

c the lack of a seedling centre in the Province of East Timor, so that each effort requires the introduction of seeds.
d Insufficient road network and isolated settlements of the population, which complicates extension/guidance.
e insufficient mobile facilities for operational personnel of the Sub-sector Agriculture to provide information.
f the farmers are not yet market oriented.

Plantation commodities with potentials for development are: coffee, coconut, candlenut, tamarind, rubber, vanilla, pepper and tobacco. Table III — 3, illustrates the productivity of plantation acreage between 1978 and 1985.

Tabel / *Table III — 3*

PRODUKTIVITAS AREAL PERKEBUNAN, 1978 - 1985 (Kg / Ha)

Jenis Tanaman	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Kelapa *Coconut*	189.25	196.75	196.02	195.97	193.24	168.20	171.16	172.92
Kopi *Coffee*	95.18	97.62	136.68	135.61	135.63	156.47	164.23	169.84
Kapuk	90.17	100.88	98.285	94,872	93.527	43.061	87.41	89.30
Cengkeh	–	–	–	–	–	–	0.40	0.34
Pinang	253.04	270.09	233.93	231.23	206.11	79.62	71.18	70.54
Kemiri	296.51	287.79	281.002	286.08	276.08	163.87	125.47	126.84

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur.

Since 1978, a Seedling Centre has ben established at Los Palos and Maliana for plantation crops, and up to now 1.000.000 coffee seedlings and 1.000.000 clove seedlings have been produced as well as 59.200 coconut trees. The seedlings were distributed to the farmers. In addition, experiments have been made in the Districts of Lautem and Viquieque to seed sugar canes. It is planned to open in the two Districts sugar cane plantation on an area of 10.000 Ha and the crop will be sent to the sugar mill at Lospalos.

In 1985, the extent of people's plantation in East Timor was as follows: coffee, an area of 18.698 ha with an average production of 169,84 Kg/Ha; coconut in an area of 48.151,60 Ha, cinnamon: 2.604,47 Ha; kapok: 9.578,21 Ha; areca: 35.307 Ha and clove in area of 1.042,5 Ha. Soon, cloves will be among the crops to play an important role in East Timor.

In Pelita IV (1984/85 — 1988/89), the plantation area to be developed will reach 156.637 Ha with an annual increase target of 2.7%. In 1985, plantation area reached 149.420 Ha. So that until the end of Pelita IV (1989) there will be an increase of 7.217 Ha.

Meanwhile, the coffee export has a tendency of increasing annually. In 1979, coffee export stood at 2.510 ton, in 1983 it increased to 5.505 ton, meaning an increase of 21.69% per annum (See Table III — 4)

Tabel / *Table III — 4*

PERKEMBANGAN EKSPOR KOMODITI KOPI PROPINSI DATI I TIMOR TIMUR, TAHUN 1979 s/d 1983

(Dalam Ton)

GROWTH OF COFFEE EXPORT IN EAST TIMOR PROVINCE. 1979 — 1983 (in Tons)

Komoditi *Commodity*	1979	1980	1981	1982	1983	Rata-rata pertumbuhan per tahun (5)/ *Average annual growth (%)*
Kopi *Coffee*	2.510	5.597	3.547	2.968	5.505	21,69

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur, Perkembangan Pelita III dan Proyeksi Repelita IV, Sektor Pertanian di Timor Timur

Source : Regional Office of The Department of Agriculture. East Timor Province. Development of Pelita III and Projection of Repelita IV East Timor Agricultural Sector.

While income of this area derived from coffee export during the last four years (1980—1983), based on the market price of Dili in 1983, reached Rp1.7 billion per year.

Sedang populasi ternak penyebarannya terbesar di Dili 16.7% dan itik sebesar 28,9%. Daerah penggembalaan terutama Lautem, Covalima, Viqueque dan Bobonaro.

Pada masa sebelum integrasi ratio jumlah ternak terhadap penduduk adalah 0,7. Tetapi, akibat terjadinya pergolakan ratio ini turun menjadi 0,2. Kini ratio bertambah secara perlahan-lahan dan sekarang diperkirakan naik kembali menjadi sebesar 0,3.

Tingkat konsumsi protein hewani masyarakat Timor Timur relatif masih rendah. Pada tahun 1983, konsumsi daging per tahun per kapita 1,36 Kg, sedang untuk telur 0,19 Kg. Pada golongan masyarakat tertentu, permintaan daging dan telur sebetulnya cukup tinggi. Besarnya permintaan masyarakat terhadap daging dan telur mendorong dilakukannya upaya pemasukan daging dan telur dari luar daerah. Gambaran tentang jumlah produksi, pemasukan dan konsumsi per kapita daging serta telur tercermin pada Tabel. Lihat Tabel III-5.

Daerah ini memiliki lahan yang potensial untuk pengembangan usaha peternakan, yang terletak di seluruh wilayah Timor Timur, dimana yang terutama adalah di daerah Kabupaten Viqueque, Manufahi, Lautem dan Kovalima.

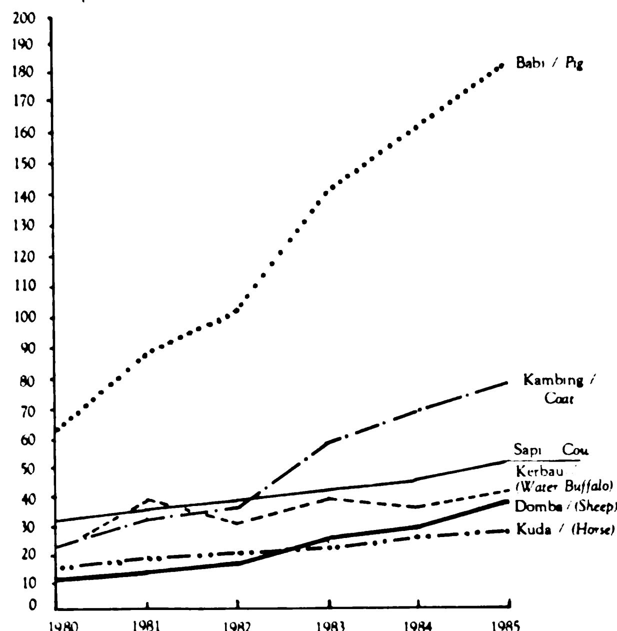
Keadaan padang rumput mempunyai kelebihan tersendiri dimana rumput tumbuh dengan sendirinya sepanjang tahun, sehingga tidak perlu memerlukan pengolahan lahan yang memakan biaya besar. Disamping itu iklim pada dataran padang rumput tersebut sangat cocok untuk kehidupan ternak.

Hal tersebut dapat dilihat bahwasanya pada masa pemerintahan Portugis, terdapat beberapa "mini-ranch" yang telah berhasil dengan baik dan maju dengan pesat seperti di Kabupaten Lautem dan Manufahi. Dan tentunya dengan adanya usaha mini-ranch pada masa itu, sudah pernah dilakukan fasibility study. Lihat Tabel III-6.

Sejak tahun 1976 populasi ternak menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian dengan usaha pemerintah populasi ternak sudah menunjukkan angka yang meningkat, dengan jalan pencegahan penyakit, mendatangkan bibit-bibit dari luar serta ternak-ternak unggul yang berasal dari Bantuan Presiden.

Mengingat bahwa populasi ternak masih relatif kecil dibandingkan luas lahan dan kebutuhan konsumsi lokal maka suatu usaha dibidang peternakan merupakan prospek yang baik di masa mendatang.

DIAGRAM
PERKEMBANGAN POPULASI TERNAK DI PROPINSI TIMOR TIMUR
DEVELOPMENT OF CATTLE POPULATION IN EAST TIMOR PROVINCE
TAHUN / *YEAR 1980 - 1985*



Sumber : Diolah dari laporan Dinas Peternakan Propinsi Timor Timur
Source : Compiled from Reports of the Animal Husbandry Service, East Timor Province.

Realisasi konsumsi protein hewani yang dicapai tahun 1983 baru sebesar 1,55 Kg/Kp/tahun atau 4,84% dari standar nasional yang ditetapkan sebesar 32 Kg/Kp/tahun. Dengan demikian kekurangan konsumsi protein hewani masyarakat Timor Timur yang belum terpenuhi sebesar 30,45 Kg/Kp/tahun atau 95,84% dari standar nasional.

d. Perikanan

Perairan di lingkungan wilayah Timor Timur mengandung berbagai jenis ikan dan bila dieksploitasi potensi perairan Timur sangat mengun-

c. Animal Husbandry

This area has a high potential to be developed for animal husbandry. According to estimates, some 148.436 Ha or 9.1.% of the plains make this area very ideal for herding.

*Yet, the cattle population is decreasing drastically due to various factors. And to restore its role as cattle supplier, several steps are necessary, such as supplying prime stock, providing pasture (grazing ground) and improving the skill of cattle farmers. For this purpose, the Government imported various kinds of cattle, such as 4.512 Bali cows, 1.500 drought master cowns from abroad and 2.800 water buffaloes. In addition, assistance was received from various private organizations, such as from the **PMI** (Indonesian Red Cross) 9.700 chicken, 950 ducks and 2.000 fish fry. While from CRS (Catholic Relief Service) 300 Bali cows which were distribution to cattle farmers, especially at Raimate.*

The District of Bobonaro has been made a pilot project of the sub-sector animal husbandry. In this pilot project, the number of cows from Presidential aid has multiplied 100% from 1978/1979 to 1982/1983. The cowns delivered in 1978/1979, totalling 1.500 have multiplied to 3.823 in 1982/1983.

The growth of cattle population in East Timor shows bright prospects. In 1983, the cattle population consisted of 39.705 cows (of which 400 were milch cows), 40.229 water buffaloes, 21.584 horses, 202.242 pigs, 74.062 goats, 17.751 sheep and 314.835 chicken.

In 1985, the cattle population was 49.761 cows (of which 400 milch cows), 35.185 water buffaloes, 23.360 horses, 182.383 pigs, 73.921 goats and 73.921 goats and 27.536 sheep.

Meat and egg production had an average annual growth of 4,02% and 1,66% respectively. The increase in meat and egg was the result of the high number of cattle being slaughtered and the population growth of chicken and ducks. The distribution of small cattle population consisting of pigs and goats was highest in the District of Dili, 29,4% and 36,4%. While the largest cattle population distribution was in Dili with 16,7% and ducks 28.9%. Herding area is mainly in Lautem, Cavalima, Viqueque and Bobonaro.

Prior to integration, the ratio between the number of cattle and population was 0,7, and as a result of a turbulent period it declined to 0,2. Now the ratio is gradually on the increase and according to estimates has reached 0.3%.

Animal protein consumption of the people in East Timor is still at a relatively low level. In 1983, meat consumption per annum per capita was 1,36 Kg, while for egg 0,19 Kg. For a certain group in the community, demand for meat and egg is actually sufficient high. This great demand encouraged the import of meat and eggs from outside the area.

This area has land with potentials to be developed into animal husbandry. This land is is the whole area of East Timor, but primarily in the Districts of Viqueque, Manufahi, Lautem and Cavalima.

The grazing area has its own advantage where grass grows continuously the whole year without special care of the land and as such save expenses. Furthermore, the climate in the grazing grounds is very suitable for cattle life.

During the Portuguese rule, there were already several "mini ranches" with good results and progressing rapidly, such as in the Districts of Lautem and Manufahi. With the presence of mini ranches, feasibility studies must have been carried out. Table III — 5, illustrates the herding area in each District.

Tabel / *Table III — 5*

No.	Kabupaten *District*	Luas Padang Penggembalaan(Ha) *Herding Area in (in Ha)*
1.	Dili	6.000
2.	Liquisa	22.575
3.	Ermera	20.775
4.	Aileu	21.753
5.	Manatuto	25.280
6.	Baucau	30.314
7.	Manufahi	30.586
8.	Viqueque	45.627
9.	Ainaro	30.259
10.	Los Palos	62.673
11.	Ambeno	38.499
12.	Bobonaro	35.294
13.	Kovalima	32.858

Since 1976, the cattle population has declined compared with earlier years. Nevertheless, with Government efforts, the population has showed improvement in cattle population by preventing disease, importing better stock as well as superior cattle from the Presidential Aid.

Considering that cattle population is still relatively low, if compared with the size of land and the local consumption requirement, activities in animal husbandry offer good prospects for the future.

tangkan. Berbagai jenis ikan yang hidup dan berkembang antara lain : ikan tongkol, cakalang, tenggiri, bandeng, kakap, bawal, kembung, **teri, saung, teripang dan belanak.**

Untuk memanfaatkan sumber-daya perairan, Pemerintah memberi**kan sejumlah** kredit dan bimbingan teknis kepada para nelayan. Untuk **memasarkan** hasil tangkapan telah dibangun pasar ikan. Tahun 1983 penduduk yang tercatat sebagai nelayan berjumlah 2.959 orang. Sedang sarana penangkapan ikan yang tersedia 1 kapal, 68 motor tempel dan 917 perahu, ditambah 90 pukat dan 220 jaring.

Kegiaan pengembangan perikanan di daerah ini antara lain, pembangunan Balai Benih Ikan di Suai, yaitu pembuatan kolam ikan seluas 2 Ha, pembuatan 2 perahu fibre glass, rehabilitasi kolam ikan dan pengadaan 100 Kg bibit ikan mas. Hingga akhir tahun 1983 terdapat sekitar 47.799 m^2 kolam ikan.

Dalam tahun 1985 tercatat 5.535 penduduk Timor Timur hidup dari usaha perikanan, 4.664 orang diantaranya sebagai nelayan dan sisanya sebagai petani ikan. Untuk sarana penangkapan ikan dalam tahun itu tersedia 1 kapal, 139 motor tempel dan 1.030 jukung yang dilengkapi dengan 8000 alat penangkapan ikan, seperti pukat, jala, jaring, bubu dan sero. Produksi ikan tahun 1985 mencapai 493,90 ton, atau baru sekitar 2,3% dari potensi perairan di Timor Timur. Lihat **Tabel III-6.**

e. Kehutanan

Luas areal hutan di seluruh Propinsi Timor Timur 392.290 Ha, sedangkan selebihnya merupakan steva dan sabana. Dari luas areal hutan, sekitar 69.357 Ha merupakan hutan lindung atau 19% dari seluruh luas areal hutan.

Hutan produktif di wilayah ini seluas 58.847 Ha, hutan cadangan 20.492 Ha, hutan campuran 133.846 Ha dan hutan HPH seluas 9.752 Ha.

Sedang luas areal tanah kritis di kawasan hutan mencapai 30.291 Ha dan tanah kritis di luar kawasan hutan seluas 30,701 Ha.

Komoditi hutan yang berhasil diekspor dalam tahun 1979/1980 antara lain : Kayu cendana 274,650 Kg, kayu manis 2.250 Kg, rotan 500 Kg dan madu 3,688 ton.

Jenis-jenis kayu yang tumbuh baik di Timor Timur : kayu cendana, jati, kayu merah dan eucalypyus. Kedua jenis kayu yang terakhir merupakan kayu bangunan yang umum dipakai. Keperluan kayu gergajian rata-rata 200-300 m^3/bulan. Kayu-kayu tersebut didatangkan dari Maluku dan Irian Jaya, dengan diangkut perahu-perahu kecil (perahu layar).

Keperluan kayu cendana untuk mensuplay pabrik minyak cendana diperkirakan 2-3 ton/hari. Dengan demikian diperlukan kayu cendana sedikitnya 50 ton/bulan untuk memenuhi keperluan pabrik.

Hutan tanaman industri di Propinsi Timor Timur direncanakan seluas 30.000 Ha, terdiri atas jenis cendana (Santalum album) jati (Tectona grandis), kayu merah (Pterocarpus indicus) dan mahoni (Swetenia macrophyla). Dalam tahun 1985/1986 telah dilaksanakan studi kelayakan seluas 10.000 Ha untuk jenis cendana di Kecamatan Tilomar Kabupaten Kovalima. Pilot project penanamannya seluas 25 Ha sedang dilaksanakan. Sesuai dengan surat Dirjen RRL Nomor 427/D/RRL/IV/1985 tanggal 18 Desember 1985 perihal Rencana Kerja HTI tahun 1985/1986, maka pembangunan unit HTI di Propinsi Timor Timur akan dilaksanakan oleh Perum Perhutani.

Dewasa ini peraturan-peraturan di Propinsi Timor Timur yang menjadi titik acuan bagi pengusaha-pengusaha yang bidang usahanya berkaitan dengan kehutanan adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Nomor 842 Tahun 1984.
- Surat Edaran Gubernur KDH Nomor : SE/DK-I/8/1985
- SK Gubernur Nomor 171/Birum/IV/78.
- SK Gubernur Nomor 82 Tahun 1979.
- SK Bupati KDH Tk II Manatuto Nomor 10 Tahun 1983
- SK Bupati KDH Tk II Manufahı Nomor 15 Tahun 1983
- SK Gubernur Nomor 179 Tahun 1986.

Di Propinsi Timor Timur sampai saat ini, kawasan hutannya belum ada yang dibebani Hak Pengusaaan Hutan (HPH). Pemeliharaan tegakan sisa hingga saat ini belum pernah dilakukan.

Eksploitasi hasil hutan yang berasal dari hutan Produksi dilakukan penduduk secara kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan penggergajian setempat dan untuk keperluan sendiri. Jenis-jenis kayu yang ditebang antara lain : Lingua (Pterocarpus indicus), Melur (Podocarpus embricatus), Eben (Diospyros Spp), Kasai (Pometia pinnata), Ampupu (Eucalyptus urophylia), Bayur (Pterospernumdiversifolium), Laban (Vitex pubescens) dan Kolaka (Parinari cory, bosum). Jumlah produksi kayu keseluruhan dari tahun ke tahun tidak diketahui dengan pasti.
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) belum ada, sedangkan penebangan kayu belum tertib.

The following diagram illustrates the development of cattle population, big and small, as well as poultry population.
The realization of animal protein consumption achieved in 1983 was inly 1,55 Kg/capita/year or 4,84% of the established national standard which is 32 kg/capita/year. As such, for the community of East Timor there is a deficiency of 30,35 Kg/capita/year or 95,84% of the national standard.

d. Fishery

The waters surrounding East Timor contain various types of fish and when exploited the potential of East Timor waters will be very beneficial. Various types of fish live and multiply, such as ***ikan tongkol*** *(tuna fish),* ***cakalang*** *(skipjack), tenggiri (Cybium),* ***bandeng*** *(kind of milkfish raised in fishponds with brackish water),* ***kakap*** *(giant perch, Lates Calcarifer),* ***bawal*** *(pomfret, Stromateus),* ***kembung*** *(mackerel),* ***teri*** *(small seafish, Stolephorus),* ***saung, teripang*** *(an edible sea-cucumber) and* ***belanak*** *(Mugil).*

In utilizing the waters' resources, the Government has given a number of credits and technical guidance to the fishermen. For the purpose of marketing their catch, a fish market was built. In 1983, 2.959 of the population were registered as fishermen. While the existing facilities for catching fish consisted of one ship, 68 motorized boats and 917 proas, in addition to 90 fishing dragnets and 220 nets.

Activities of fishery development in this area include the establishment of a ***Balai Benih Ikan*** *(Fish Hatchery) in Suai, i.e. a fish pond of two hectares, two fibre glass proas, rehabilitation of fish ponds and supplying 100 Kg of gold-fish fry. Until the end of 1983, there were some 47.799 square meters of fish ponds.*

In 1985, 5.535 of the population of East Timor were registered to earn a living from fishery. Among them, 4.664 as fishermen and the others as fish farmers. In that year, existing facilities for catching fish consisted of one ship, 139 motorized boats and 1.030 tree-trunk canoes equipped with 8000 tools to coatch fish, such as dragnets, casting nets, nets, ***bubu*** *and fish-traps. Fish production in 1985 reached 493,90 ton, or only 2,3% of the potentials of East Timor's waters.*
In order to know the development of fish production from 1979 until 1983, please see Table III — 6

Tabel/*Table III — 6*

No	Komoditi *Commodity*	1979	1980	1981	1982	1983	Rata-rata pertumbuhan per tahun (%) *Everage per Annum (%)*
1.	Perikanan Laut	236,3	259,2	380,2	397,3	405,3	14,14
2.	Perikanan Darat	—	—	—	—	— —	
	Jumlah *Total*	236,3	259,2	380,2	397,3	405,3	14,14

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Timor Timur
Perkembangan Pelita III dan Proyeksi Repelita IV Sektor Pertanian di Timor Timur

e. Forestry

Forests in East Timor Province cover an area 392.290 Ha, while the rest are steva and sabana. Of the forest area, some 69.357 Ha or 19% is protected forest.

Production forest in this area is 58.847 Ha, reserve forest: 20.492 Ha, mixed forest 133,846 Ha and HPH forest (Right for Forest Exploitation) 9.752 Ha. While the size of critical land in the forest area is 30.291 Ha, and critical land outside the forest area is 30.701 Ha.

Forest commodities exported in 1979/1980 were among other: sandalwood 274,650 Kg, cinnamon 2.250 Kg, rattan 500 Kg and honey 3.688 ton.

Among the timber that grow well in East Timor are sandalwood, teak, red wood and eucalyptus. The last two are generally used as building material. The requirement for sawn timber avaraged 200—300 M^3/month. Those timber are shipped from Maluku and Irian Jaya, using small proas (sailing proas).

The daily requirement of the sandlewood oil factory is estimated at 2—3 tons of sandalwood, making a minimum monthly requirement of 50 tons. Forest for industrial purposes in East Timor Province is planned at 30.000 Ha, consisting of various species of trees such as ***cendana*** *(Santalum album),* ***jati*** *(teak, Tectona grandis),* ***kayu merah*** *(redwood, Pterocarpus indicus) and* ***mahoni*** *(mahogany, Swetenia Macrophyla). A feasibility study as conducted in 1985/1986 covering an area of 10.000 Ha for the cendana species in the Tilomar Sub-district of Cavalima District. The pilot project of planting in an area of 25 Ha is being carried out. In accordance with the Letter of the Director General/Dirjen RRL No 427/D/RRL/V/1985 dated 18 December 1985, concerning the Work Program of HTI for 1985/1986, establishing of HTI unit in the Province of East Timor shall be carried out by the* ***Perum Perhutani.***

Jumlah produksi kayu per tahun untuk bahan baku 10 perusahaan penggergajian kayu yang ada sebesar 5.115 m³/tahun. Dari sepuluh perusahaan penggergajian yang terdaftar baru 3 (tiga) buah yang berbadan hukum dan sisanya usaha perorangan yang belum mengenal manajemen. Produksi kayu yang dihasilkan selama tahun 1984/1985 adalah 3.359 m², terdiri dari jenis-jenis kayu merah, jati, besi, hitam, eucalyptus dan lain-lain.

Penebangan kayu cendana (Santalum album) dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri minyak cendana di Dili dan pembuatan kipas cendana di Atambua, namun koordinasi/pengawasan eksploitasi belum tertib.
Industri minyak cendana milik PT. Scent Indonesia mendapat Izin Prinsip tanggal 21 Oktober 1978 berlokasi di Oekussi, kemudian diubah menjadi tanggal 5 Juli 1979 berlokasi di Dili. Kapasitas produksi yang ditargetkan 1.200 kg minyak cendana per tahun.

Industri meubel yang tercatat 16 buah yaitu 15 buah di Dili dan 1 buah di Viqueque (data tahun 1982). Namun pada tahun 1986 muncul perusahaan-perusahaan meubel kecil yang menggunakan bahan baku kayu eks Kalimantan dan Ambon serta bahan dari tripleks (plywood).

2. Perhubungan

Peranan sarana dan prasarana perhubungan di daerah ini sangat penting, terutama dalam pengembangan Propinsi Timor Timur agar sejajar dengan daerah-daerah lainnya.

a.Perhubungan Darat

Keadaan jalan sebelum masa integrasi, yang dapat dilalui kendaraan bermotor baru mencapai 1.845 Km, terdiri dari jalan negara 450 Km, jalan propinsi 895 Km dan jalan kabupaten sepanjang 500 Km.

Sementara trayek angkutan kota yang dapat dilayani oleh kendaraan bermotor adalah : Dili-Liquisa PP 55 Km ; Dili-Aileu-Maubesi-Ainaro dan Zumalai PP 202 Km ; Dili-Manatuto-Baucau-Viqueque PP 197 Km; Dili-Railaco-Ermera PP 62 Km; Dili-Remario PP 23 Km; dan Maliana-Balibo-Batugede PP 44 Km.

Jumlah kendaraan bermotor 2.800 buah terdiri dari : sepeda motor 1.606 buah, mobil penumpang 601 buah, mobil barang 569 buah dan mobil bus 32 buah. Sedang jumlah penumpang yang mempergunakan jasa angkutan dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 1976 jumlah penumpang yang diangkut 33.585 orang dan pada tahun 1980 jumlah 160.000 orang. Tarif angkutan untuk Taxi dalam kota sebesar Rp 250,-/km pertama, sedangkan tarif bus umum Rp 50,-/orang.

Hingga Maret 1984, jaringan perhubungan darat telah mencapai 2.957 km. Permukaan jalan ini terdiri dari tanah, kerikil dan aspal. Jaringan perhubungan yang menghubungkan Dili sebagai ibukota propinsi dengan ibukota-ibukota kabupaten lainnya, seperti Maliana di sektor barat sampai ke Lospalos di sektor timur dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan kota-kota sekitarnya. Walaupun kondisi permukaan jalan sebagian besar terdiri dari tanah dan kerikil, tetapi dibanding dengan masa sebelumnya, keadaannya jauh lebih memadai. Sejalan dengan pembangunan tersebut dibangun 18 jembatan, pada Agustus 1984 selesai pembangunan jembatan Sungai Laclo (Manatuto) yang panjangnya 270 meter. Keadaan seperti ini tentu sangat mempengaruhi arus perekonomian di Timor Timur, misalnya laju pemasaran hasil pertanian dan meningkatnya mobilitas penduduk.

Bertambahnya jaringan transportasi darat diikuti pula dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Pada tahun 1985 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 7.576 buah, terdiri dari 1.129 sedan, 1.859 jeep, pick-up dan truck, 122 bus dan 4.466 sepeda motor. Dibandingkan dengan tahun 1976, jumlah kendaraan bermotor di Timor Timur sekarang meningkat ratusan persen.

Bertambahnya prasarana dan sarana perhubungan darat diikuti dengan bertambahnya pelayanan angkutan umum masyarakat. PN Damri (perusahaan milik negara) mengoperasikan puluhan bus sebagai alat transportasi umum. Sejumlah armada PN Damri secara rutin melayani trayek dalam kota Dili, antar kota maupun antar propinsi. Trayek dalam kota Dili mencakup Mercado-Bakara pp; Mercado-Komoro pp; Mercado-Taibere-Hospital pp. Trayek antar kota meliputi Dili-Baucau-Viqueque-Los Palos pp; Dili-Mandese-Same-Ainaro pp; Dili-Liquica-Maubara pp; Dili-Ermera-Maliana pp. Sedang trayek antar propinsi telah menghubungkan Dili-Kupang (Propinsi Nusa Tenggara Timur) pp lewat Maliana dan Atambua. Selain PN Damri, beberapa perusahaan swasta juga mengoperasikan bus-busnya sebagai alat transpor umum ke seluruh pelosok Timor Timur.

Khusus Kabupaten Dili, karena kedudukannya sebagai pusat pemerintahan dan pintu masuk kegiatan ekonomi ke kabupaten-kabupaten lainnya, maka baik sarana maupun prasarana transportasi dan komunikasi relatif baik. Jalan-jalan sudah beraspal baik dalam kota Dili maupun sampai ke Ibukota kecamatan. Untuk dalam kota terdapat angkutan

Presently, regulations in the Province of East Timor which are reference points for enterpreneours whose activity is related with forestry, are as follows:
- *Regional Regulation No 842 of 1984.*
- *Circular letter of the Governor No SE/DK—I/8/1985*
- *Decision of the Governor No 171/Binum/IV/78.*
- *Decision of the Governor No 82 of 1979.*
- *Decision of the Bupati of Manatuto No 10 of 1983.*
- *Decision of the Bupati of Manufahi No 15 of 1983.*
- *Decision of the Governor No 173 of 1986.*

*Until now, the forest area in East Timor Province is not yet engaged in **HPH** (Hak Pengusahaan Hutan, Forest Explotation Right). There has never been, so far, maintenance on remnants of stands.*

*Explotation of forest produce originating from Production Forest is carried by the population on a samll scale, only to meet the requirement of the local sawmill and for own purposes. Among the three species felled are: **Lingua** (Pterocarpus indicus), **Melur** Podocarpus embricatus), **Eben** (Diospyros Spp), **Kasai** (Pometia Pinnata), Ampupu (Eucalyptus urophylia), **Bayur** (Pterospernumdiversifolium), **Laban** (Vitex pubescent) and **Kolaka** (Parinari cory, bosum).*
*The total timber production from year to year is not difinitely known. There is no **HPH**, and the felling of trees is not in the proper way.*

The amount of timber production per year as raw material for ten existing sawmills is 5.115 m³. Of the sawmills, three have been registered as corporate bodies and the others operate as individual business without formal management, yet. Timber production in 1984/1985 was 3.359 m³, consisting of the following trees species: redwood, teak, ironwood, ebony, eucalyptus and other.

The felling of sandalwood (Santalum alum) by the people is to meet the requirements of raw material for the sandalwood oil industry in Dili and to make fans from sandalwood in Atambua, but there is still no proper coordination/control.

The industry of sandalwood oil owned by PT Scent Indonesia has a License in Principle dated 1978, located at Oekussi, then on 5 July 1979 changed and located at Dili. The production capacity is targeted at 1.200 kg of sandalwood oil per year.

16 Furniture industries were registered, i.e. 15 at Dili and one at Viqueque (according to 1982 data). But in 1986, small furniture campanies emerged using as raw material timber from Kalimantan and Ambon as well as plywood.

2. Communication

The role of communication facilities and infrastructure is very important in this area, especially in order for the East Timor Province reaching the same level as the other areas.

a. Land Communication

Prior to integration, there were only 1.845 Km roads which can be used by vehicles, consisting of 450 Km State road, 895 Km Provincial road and 50 Km District road.

The following inter-city lines are maintained by motorized vehicles: Dili — Liquisa vv. 55 Km; Dili—Aile—Maubesi—Ainaro Zumalai vv. 202 Km; Dili—Manatuto—Viqueque vv. 197 Km; Dili—Railaco—Ermera vv. 62 Km; Dili—Remario vv. 23 Km; and Maliana—Balibo—Batugede vv. 44 Km.

There were 2.800 motorized vehicles consisting of: 1.606 motor cycles, 601 passenger cars, 569 trucks and 32 buses. The number of passengers utilizing transportation services kept increasing annually. In 1976, the number of passengers was 33.585, increasing to 160.000 in 1980. The city taxi fare was Rp250,- for the first kilometer and for the public bus Rp50,-/person.

Up to March 1984, the land transportation network reached 2.957 Km. The road surface consists of earth, gravel and asphalt.
The communication network between Dili as capital of the Province and the capitals of the other Districts, such as Maliana in the western sector up to Lospalos in the eastern sector, connects the Districts's capital with the surrounding cities. Although most of the road surface consists of earth and gravel, but compared with the past the condition is better. In line with road development, 18 bridges were constructed, and in August 1984, the 270 m long bridge over the Lacle river in Manatuto was completed. This is of great influence to the economy in East Timor, such as improved marketing of agricultural produce and increased mobility of the population.

The addition in land transportation network was accompanied by an increase in the number of motorized vehicles. In 1985, there were 7.576 motorized vehicles consisting of 1.129 sedans, 1.859 jeeps, pick-ups and trucks, 122 buses and 4.466 motor cycles. Compared with 1976, the number of motorized vehicles in East Timor has increased many times.
Improvement in land communication facilities and infrastructure is followed by an increase in the services rendered to the public. The PN Damri (state-owned transportation enterprise) is operating tens of buses as means of public transport. A fleet of Damri buses maintains a regular service in the city of

penumpang taksi dan bus. Untuk luar kotapun sudah ada hubungan dengan ibukota yang dihubungkan oleh mobil angkutan barang dan mobil bus.

b. Perhubungan Laut

Berdasarkan SK Menteri Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut No Km462/0/Phb/1976, tanggal 10 Desember 1976, pelabuhan Dili ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan. Disamping itu Pelabuhan Dili dinyatakan sebagai pelabuhan Laut yang terbuka bagi perdagangan umum. Selain sebagai pelabuhan antar pulau, terbuka pula untuk perdagangan luar negeri, baik untuk ekspor maupun impor. Sehingga kapal-kapal samudra yang berbobot mati lebih dari 500 DWT dapat menyinggahi pelabuhan.

Hal ini disebabkan alur perairan mempunyai kedalaman cukup besar, yaitu lebih dari 1000 m LWS, sedangkan kedalaman di muka dermaga mencapai 9000 m LWS. Pelabuhan Dili telah selesai direhabilitasi, yaitu penambahan fasilitas untuk memperlancar arus bongkar muat barang. Setiap minggu rata-rata 3 kapal yang bongkar/muat barang di pelabuhan, baik untuk memenuhi keperluan Timor Timur maupun memuat hasil-hasilnya ke luar pelabuhan Dili. Mulai Agustus 1986, pelabuhan laut Dili dilayari oleh kapal penumpang mewah KM "Kelimutu", berkapasitas 920 penumpang dan secara rutin akan melayari trayek Dili dengan kota-kota di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali dan Jawa. Dengan adanya pelayaran ini, maka hubungan Timor Timur dengan propinsi-propinsi lainya semakin meningkat.

Selain pelabuhan Dili, masih terdapat beberapa pelabuhan lokal yang menghubungkan beberapa tempat di Timor Timur, seperti Pante Makasar (Ambenu); Maubara & Liquica; Manatuto, Laga & Baucau; Con & Jace (Lautem) di pantai utara serta Aleambata & Be Assu (Viqueque); Betano (Same) dan Suai di Pantai selatan. Untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan lokal tersebut, sejak tahun 1983 satu kapal perintis "Elang" malayaninya secara rutin.

Angka keluar masuk kapal-kapal di Pelabuhan Dili semakin meningkat, pada tahun 1978 tercatat 148 buah kapal dan tahun 1979 menjadi 170 buah kapal. Demikian juga volume bongkar muat barang terus meningkat.

Melihat kondisi pelabuhan Dili sebagai pintu gerbang perdagangan dan perekonomian Propinsi Timor Timur, maka diharapkan prospeknya akan semakin baik.
Hambatan yang sekarang dialami antara lain kurangnya karyawan trampil, dan terbatasnya spare-part pelabuhan, terutama untuk derek barang-barang dari kapal ke gudang-gudang.

c. Perhubungan Udara

Perhubungan Udara masih merupakan sarana perhubungan yang efektif dan berperan di Timor Timur, baik untuk kepentingan lokal maupun antar pulau/propinsi. Di wilayah Timur Timor terdapat 3 buah Pelabuhan Udara yang berkategori sedang. **Pertama** pelabuhan udara **Komoro** di Dili yang berfungsi sebagai pelabuhan udara angkutan umum. **Kedua** pelabuhan udara Dili yang dipergunakan sebagai pelabuhan Udara Khusus Helikopter. **Ketiga** Pelabuhan Udara **Baucau** belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk keperluan umum.

Pelabuhan Udara Komoro merupakan pintu gerbang udara Timor Timur. Setiap hari melayani pesawat Fokker F-28 milik Garuda Indonesia Airways, dengan trayek Jakarta-Denpasar-Kupang-Dili pp dan Surabaya-Denpasar-Kupang-Dili pp.

Selain pelabuhan udara Komoro, terdapat lapangan terbang perintis di beberapa kabupaten yang dapat didarati pesawat-pesawat terbang jenis CASA, CESSNA dan TWIN OTTER. Dalam bulan April tahun 1983 Merpati Nusantara Airlines (MNA) membuka trayek penerbangan perintis dengan rute Kupang-Dili-Maliana-Covalima pp dan Kupang Atambua-Dili pp. Masing-masing dilakukan dengan dua kali penerbangan seminggu.

Program dan langkah-langkah yang dilaksanakan di sektor perhubungan dalam Pelita IV adalah : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 734 km; Proyek Penunjang jalan dan jembatan sepanjang 1904,9 km; Proyek Peningkatan jalan sepanjang 529,9 km; Proyek penggantian jembatan sepanjang 1468,4 m; Pembangunan sarana penunjang rambu lalu lintas, peralatan komunikasi, terminal dan kantor; Pembangunan fasilitas pelabuhan laut dan bandar udara; Pengoperasian bus angkutan perintis; Proyek Pembangunan fasilitas keselamatan Pelayaran; Pengembangan fasilitas kesyahbandaran; Pengembangan fasilitas KPLP dan Pembangunan stasiun meterologi dan geofisika.

d. Telekomunikasi

Pembangunan di bidang telekomunikasi sejak awal sudah dilakukan. Dengan beroperasinya Stasiun Bumi Kecil di Dili sejak tahun Mei 1979,

Dili, inter-city as well as inter-provincial routes. In the city of Dili the routes cover Mercado—Bakara vv.; Mercado—Komoro vv.; Mercado—Taibere—Hospital vv.. Among the inter-city trajects are: Dili—Baucau—Viqueque—Los Palos vv.; Dili—Mandese—Same—Ainaro vv.; Dili—Liquica—Maubara vv.; Dili—Ermera—Maliana vv.. While the inter-provincial traject connects Dili with Kupang (East Nusa Tenggara Province)vv. via Maliana and Atambua. In addition to PN Damri, there are several private companies operating their buses as public transport to all corners of East Timor.

Especially with regard to Dili District, due to its position as centre of the government and gate of entry for economic activities to the other districts, communication and transportation facilities and infrastructure are relatively good. The roads are asphalted, both in Dili as well as to the capitals of subdistricts. In the city itself, taxis and buses are available. There is transportation from the cities to the capital both for passengers as well as cargo.

b. Sea Communication

Based on the Decision of the Minister of Communication cq the Director General of Sea Communication No Km462/0/Phb/1976, dated 10 December 1976, the harbour of Dili is established as a harbour under exploitation. Furthermore, the harbour of Dili is declared a harbour which is open fo general trading, also for inter-island trade, foreign trade, for export as well as for import. So that the harbour can handle ocean-going vessels of more than 5.000 DWT. This is among other due to the water channel with sufficient depth of over 1.000 LWS, while at the wharf the depth reaches 9.000 LWS. Rehabilitation of Dili harbour was completed with the addition of facilities for loading and unloading. Each week an average of three vessels load/unload cargo at the harbour, both for meeting the need of East Timor as well as exporting products from Dili. As of August 1986, the KM "Kelimutu", a ship with a capacity for 920 passengers, has been making regular calls at Dili, establishing a regular connection with cities in East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Bali and Java. East Timor's link with other provinces is on the increase.

In addition to Dili, there area a number of local harbour to link several places in East Timor, such as Pante Makasar (Ambenu); Maubara & Liquica; Manatuto, Laga & Baucau; Con & Jace (Lautem) on the north coast and Aleambata & Be Assu (Viqueque); Betano (Same) and Suai on the south coast. To link the local harbours, since 1983, the "Elang", a pioneership, started service on a regular basis.

The number of vessels entering and leaving the harbour of Dili increased. In 1978 were recorded 148 vessels, while 170 in 1979. There was also an increase in the volume of cargo movement.

Considering the position as gateway for trade and economy of East Timor, the prospects for Dili harbour will improve. Among the constraints are the lack of skilled personnel, limited facilities including cranes for unloading cargo from ship to godown.

c. Air Communication

*Air communication is an effective means of communication and plays a role in East Timor, both for local as well as inter-island/province. The East Timor region has three moderate airports. One is **Komoro,** the airport of Dili which functions as airport for general transport. The two other airports are especially for Helicopters. While the airport at **Baucau** is no yet fully utilized for general transport.*

As the gateway of East Timor, the Komoro airport serves daiuly flight of the Fokker F—28 owned by Garuda Indonesian Airways, with the route Jakarta — Denpasar — Kupang — Dili vv., and Surabaya — Denpasar — Kupang — Dili vice versa.

Besides Komoro airport, there are pioneer airports in several districts, capable of serving aircrafts of types such as CASA, CESSNA and TWIN OTTER. Since April 1983, Merpati Nusantara Airline (MNA) is maintaining a pioneer flight between Kupang—Dili—Maliana—Covalima vice versa and Kupang—Atambua—Dili vice versa, each route being served twice a week.

The program and steps carried out in the communication sector in Pelita IV include: Rehabilitation/Maintenance program of 734 Km road and bridges; Project for Road Embetterment of 1.904,9·Km; 529,9 Km of road improvement; bridge replacement of 1468,9 Km; the construction of support facilities for land transportation, such as traffic signs/broads/lights, communication equipment, terminals and offices; the construction of harbour and airport facilities; the operating of pioneer bus transport; a project for providing safety navigation facilities; developing facilities of the harbormaster/port authority; providing coast guard facilities and the construction of a station for meteorology and geophysics.

d. Telecommunication

Development in the telecommunication sector is carried out from the start. With the operation of the Mini Earth Station in Dili since may 1979, through the "Palapa" Domestic Satellite Communication System, East Timor Pro-

melalui Sistem Komunikasi Satelit Domestik "Palapa", Propinsi Timor Timur dapat berhubungan melalui telepon dengan kota-kota di seluruh Indonesia, dari Banda Aceh sampai ke Jayapura. Khusus di Dili dipergunakan Sentral Telepon Otomat berkapasitas 479 sambungan induk yang akan dikembangkan dengan sistem baru Sentral Telepon Digital berkapasitas 2.000 line unit. Pemakaian pulsa pada tahun 1985 cukup tinggi, mencapai 80.000 pulsa rata-rata per bulan.

e. Pos dan Giro

Untuk meningkatkan pelayanan lalu lintas pos dan giro pada akhir tahun 1984 selesai dibangun gedung Pos dan Giro baru di Dili. Sampai tahun 1986 fasilitas Kantor Pos Dili meliputi 11 loket pelayanan, 804 kotak pos dan 11 bis surat.

Sedangkan lalu lintas Pos dan Giro Dili dalam tahun 1985 mencatat pengiriman surat pos dalam negeri sebanyak 1.319.882 pucuk dan penerimaan 1.788.794 pucuk surat, pengiriman surat pos luar negeri 4.635 pucuk dan penerimaan 956 pucuk surat, penerimaan 9.557 kali paket pos dan pengiriman 1.450 kali paket pos, pembayaran 4.078 wesel pos dalam negeri bernilai Rp 221.126.000,- dan pengiriman 36.492 wesel pos bernilai Rp 2.617.764.000,-. Selain itu dibangun 7 Kantor Pos Pembantu masing-masing di Pante Makasar (1978), Baucau (1980), Ermera (1981), Maliana (1985), Suai (1985), Manatuto (1986), Liquica (1986).

f. Meteorologi

Semasa pemerintahan Portugis di Timor Timur terdapat 4 buah Stasiun Meteorologi Sinoptik di Lapangan udara yang menyelenggarakan pengamatan meteorologi untuk analisa cuaca dan pelayanan penerbangan. Keempat stasiun meteorologi terdapat di Dili, Baucau, Oecussi dan Viqueque. Selain itu terdapat 29 buah stasiun pengamat iklim yang letaknya tersebar di seluruh wilayah Timor Timur.

Sedang stasiun pengamat hujan terdapat di 33 buah tempat terpencar di seluruh wilayah Propinsi.

Dalam Pelita IV sasaran di bidang meteorologi dan geofisika adalah pembangunan stasiun meteorologi dan geofisika dan beberapa pos iklim dan hujan di seluruh wilayah.

Untuk menunjang sasaran pembangunan pos dan telekomunikasi yang diinginkan selama Pelita IV, diadakan program peningkatan jasa Pos dan Telekomunikasi seperti :

a. Pembebasan tanah dan pembangunan gedung KPP annex, rumah dinas di Maliana, Suai, Liquisa, Manatuto, Pantai Makasar, Aileu, Ainaro, Same, Viqueque, Los Falos dan Kecamatan Atauro.
b. Pembangunan gedung PERUMTEL (Sentral Telepon dan Telegrap) dan SBK di Suai, serta Bobonaro, Los Palos, Viqueque, Same, Aileu, Ainaro, Ermera, Liquisa, Manatuto, Pantai Makasar dan Kecamatan Atauro.
c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan serta sarana kantor lainnya.
d. Pembangunan dan pengadaan sarana serta prasarana Radio Monitoring Frequency.

3. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan di wilayah ini dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan utama ditekankan pada rehabilitasi serta pelayanan kesehatan yang bersifat pencegahan, disamping mengembangkan upaya kesehatan lainnya secara lebih luas.

Dalam tahapan rehabilitasi di tahun 1976/1977, pembangunan fisik dilakukan berupa rehabilitasi sarana-sarana kesehatan. Termasuk pembangunan kembali Rumah Sakit Dili yang saat itu keadaannya sangat parah. Disamping pembangunan fisik, usaha pelayananpun terus ditingkatkan. Seperti mendatangkan tenaga-tenaga dokter dan para medis dari luar propinsi Timor Timur dalam waktu 3 bulan. Untuk menunjang kegiatan rumah-rumah sakit dan kegiatan kesehatan lainnya, dilakukan upaya pengadaan obat-obatan, mengatur pendistribusian dan pengisian tenaga staf di lingkungan Dinas Kesehatan. Baik oleh tenaga lokal maupun dari luar propinsi.

Memasuki tahun anggaran 1978/1979, usaha-usaha penanggulangan kesehatan ditingkatkan dengan mengaktifkan kembali tenaga para medis lokal dan menugaskan mereka di rumah-rumah sakit di seluruh wilayah Timor Timur. Sedangkan pelayanan kesehatan di RSU Dili dan kebupaten-kabupaten ditanggulangi team khusus PMI dan Kesehatan ABRI.

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, usaha-usaha penyuluhan kesehatan termasuk pengamatan penyakit-penyakit menular di kawasan masyarakat terus ditingkatkan.

Memasuki tahun I Pelita III, usaha-usaha yang dirintis sebelumnya terus dikembangkan bahkan ditingkatkan. Seperti pengobatan massal, pengadaan air bersih, penyuluhan hygiene perorangan dan lingkungan, termasuk di daerah-daerah pemukiman.

vince is able to communicate by telephone with cities all over Indonesia, from Banda Aceh to Jayapura. Especially, with the use of an automatic telephone exchange in Dili with a capacity of 479 main connections which will be developed with the new system, the Digital Telephone Exchange with a capacity of 2.000 line units. Pulse utilization in 1985 was relatively high, reaching a monthly average of 80.000 pulse.

c. Postal and Giro Services

To improve postal and giro services, a new Post and Giro Office was completed in Dili at the end of 1984. Until 1986, facilities of Dili's Post Office covered 11 customer windows, 804 post office boxes and 11 pillar (letter) boxes.

While in 1985, the Dili Post and Giro Office handled domestically 1.319.882 outgoing and 1.788.794 incoming letters, 4.635 letters to and 956 letters from abroad, received 9.557 postal packages and sent 1.450, paid out 4.078 domestic money orders totalling Rp221.126.000,- and sent 36.492 money orders with a value of Rp2.617.764.000,-. In addition, seven sub-post offices were built, respectively in Paste Makassar (1978), Baucau (1980), Ermera (1981), Maniala (1985), Suai (1985), Manatuto (1986) and Liquica (1986).

f. Meteorogy

During the Portuguese administration in East Timor, four Synoptic Meteorological Stations at airports conducted meteorological observations for weather analyses and provided services to aviation. The four meteorological stations are at Dili, Baucau, Oecussi and Viqueque. In addition, there are 29 climate observation stations scattered in the whole territory of East Timor.

While 33 rain observation stations are distributed throughout the province

In Pelita IV, the sector of meteorology and geophysics is aiming at constructing a meteorology and geophysics station and several climate and rain posts in the whole territory.

In supporting development objective of post and telecommunications during Pelita IV, a program is made to step up services in that sector which include:

a the release of land and construction of Main Post Office (KPP) with an official residence in Maliana, Suai, Liquisa, Manatuto, Pantai Makasar, Aileu, Ainaro, Same, Viqueque, Los Palos and Atauro Sub-district.
*b the construction of a PERUMTEL building (Telephone and Telegrapgh Exchange) and **SBK** (Mini Earth Station) in Suai and Bobonaro, Los Palos, Viqueque, Same, Aileu, Ainaro, Ermera, Liquisa, Manatuto, Pantai Makasar and Atauro Sub-district.*
c the supply of tools and equipment as well as other office facilities.
d the construction and supply of Radio Monitoring Frequency facilities and infrastructure.

3. Health

Development of the health sector in this region is carried out in stages. The main activity is emphasized at rehabilitation and preventive health service, in addition to wider expansion of other health efforts.

In the rehabilitation stage of 1976/1977, physical development is carried out by rehabilitating health facilities, included rebuilding of the Dili Hospital which was in a very bad shape. In addition to physical development, health services are continuously improved, such as recruiting doctors and paramedict from outside East Timor Province within three months. To support hospital and other health activities, efforst are made to provide medicines, arrange the distribution and placement of staff personnel in the Health Service, whether by local personnel as well as from outside the province.

*Entering fiscal year 1978/1979, health efforts are stepped up by reappointing local para medics and assign them at hospitals in the whole territory of East Timor. While health services at the General Hospital in Dili and the districts are handled by a special team of the **PMI** (Indonesian Red Cross) and by the ABRI (Armed Forces) Health Section.*

To improve public awareness on the importance of health, steps are taken for health extension, included continuous observation of contagious disease in the society.

In the first year of Pelita III, all previous activities continued and even stepped up, such as, mass medical care, supply of clean water, extension of personal hygiene and the environment, especially settlement areas.

In order to meet the need for experts in the health sector and to prepare the establishment of a Regional Office of the Department of Health in East Timor, a number of doctors and other technical staff are assigned. As a first step 13 doctors and 26 nursing staff are put on compulsory military service in all districts of East Timor.

For meeting the requirements of medical personnel for the Dili General Hospital, some 49 nursing staff are recruited from outside the area. To upgrade the local health personnel, various courses are conducted as well as sending 40 people for a two-month job training to East Nusa Tenggara, Bali and Java. While in providing public health service to rural areas, a roving Public Health Centre (Puskesmas) is introduced.

Untuk memenuhi keperluan akan ahli-ahli di bidang kesehatan dan untuk mempersiapkan terbentuknya Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Timor Timur diperbantukan sejumlah dokter dan tenaga teknis lainnya. Sebagai langkah pertama ditempatkan 13 dokter dan 26 tenaga perawat wajib militer ke seluruh kabupaten di Timor Timur.

Untuk memenuhi keperluan tenaga medis di RSU Dili didatangkan **tenaga-tenaga** perawat dari luar daerah sebanyak 49 orang. Untuk meningkatkan tenaga kesehatan lokal telah diadakan berbagai penataran serta job training ke Propinsi NTT, Jawa dan Bali bagi 40 orang selama 2 bulan. Sedang untuk menjangkau pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke pedesaan, diadakan Puskesmas keliling.

Dalam tahun ke II Pelita III pembangunan sektor kesehatan di propinsi ini lebih ditingkatkan lagi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kegiatan antara lain dengan tersedianya anggaran yang cukup memadai. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu antara lain pembangunan Rumah Sakit type C dan 2 buah type D, rehabilitasi gedung Sekolah Penilik Kesehatan (SPK) di Dili tahap kedua, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih, peningkatan kesehatan dan sarana kesehatan, penyediaan air bersih, peningkatan kesehatan dan sarana kesehatan, pengadaan obat-obatan, pembuatan jamban, penataran tenaga kesehatan dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit di setiap Kabupaten.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Timor Timur tahun 1985 berupa 5 rumah sakit dengan kapasitas 475 tempat tidur. Tiga diantaranya merupakan rumah sakit yang baru dibangun, seperti Rumah Sakit Umum Pusat Dili dengan kapasitas 300 tempat tidur; Rumah Sakit Umum Maliana dan Rumah Sakit Umum Baucau, masing-masing dengan 50 tempat tidur; 3 Puskesmas Rawat Nginap, masing-masing dengan 10 tempat tidur, 28 Puskesmas, 115 Puskesmas Pembantu dan 48 Puskesmas Keliling serta 132 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Perbandingan tempat tidur dengan penduduk 1 : 1.000. Untuk menunjang pelayanan kesehatan ini terdapat 3 apotik dengan 5 apoteker.

Tenaga kesehatan yang tersedia 88 dokter umum, 4 dokter ahli (1 ahli kesehatan anak dan 1 ahli penyakit dalam) dan 11 dokter gigi. Tenaga-tenaga kesehatan ini dibantu ratusan perawat dan puluhan bidan. Rasio dokter di Timor Timur melebihi rasio rata-rata dokter di Indonesia. Di propinsi ini, rasio dokter 1 : 7.000, sedangkan rasio dokter nasional 1 : 13.000.

a. Sekolah Perawat Kesehatan

Sejak tahun 1980, dibuka Sekoalh Perawat Kesehatan (SPK) di Dili dengan angkatan pertama 30 siswa. Pada tahun 1983 SPK ini menghasilkan 27 perawat. Para perawat ini disebar ke Puskesmas-puskesmas. Kapasitas penerimaan SPK diusahakan untuk diperbesar dan mulai tahun ajaran 1983/1984, sekolah ini mampu menerima 80 siswa. Dengan diperbesarnya kapasitas SPK diperkirakan sejak tahun 1986, dihasilkan 75 - 80 perawat per tahun. Sampai saat ini SPK Dili menghasilkan 176 perawat. Pendidikan tenaga-tenaga kesehatan ke luar Timor Timur juga telah dilaksanakan, yakni mengirim 41 tenaga kesehatan tingkat dasar, 33 tingkat semi akademi, 26 tingkat akademi, 6 tingkat sarjana dan 2 pasca sarjana.

Pelayanan perbaikan kesehatan rakyat terutama ditujukan kepada pengobatan dan penyakit yang paling banyak diderita rakyat. Pemberantasan penyakit malaria dengan penyemprotan DDT berhasil menurunkan angka parasif rate dari sekitar 50% - 75% tahun 1982 menjadi 15% 1985. Upaya pemberantasan TBC dilaksanakan dengan memeriksa 14.000 orang yang diduga menderita penyakit dan mengobati 579 orang penderita. Dilaksanakan pula pengobatan terhadap 16.605 orang penderita penyakit filaria dan 35.918 orang penderita frambusia.

Upaya pencegahan terhadap timbulnya berbagai penyakit menular dilakukan dengan program imunisasi terhadap penduduk, terutama terhadap bayi dan anak-anak dibawah usia 5 tahun (Balita) serta kepada wanita hamil. Program ini mulai intensif dijalankan tahun 1981 terutama ditujukan pencegahan penyakit TBC, Diptheria, Tetanus, Polio dan Campak. Hingga saat ini telah dilaksanakan imunisasi BCG kepada 23.361 bayi, imunisasi DPT kepada 10.205 anak, imunisasi Campak kepada 14.557 anak, imunisasi Polio kepada 10.681 anak dan imunisasi Tetanus toxoid kepada 7.099 wanita hamil.

Sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan program perbaikan gizi yang terutama ditujukan kepada bayi, anak balita, ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Pada tahun 1982, sejumlah anak Balita mengikuti program ini dengan keadaan 60% bergizi kurang dan 10% bergizi buruk. Namun setahun kemudian keadaan gizi anak-anak Balita meningkat menjadi 70% bergizi baik, 25,2% bergizi kurang baik dan 4,8% bergizi buruk.

Untuk pencegahan gondok endemik, dilakukan penyuntikan Lipiodol kepada 13.200 penduduk, sedang pemberian vitamin A dosis tinggi untuk mencegah penyakit rabun senja/kebutaan diberikan kepada 5.602 anak Balita. Untuk memonitor status gizi anak diisi 15.773 Kartu Menu-

In the second year of Pelita III, the development of health sector in this province in even more improved, both in quality as well as quantity. Increased activities could be carried out among others due to better allocation of the budget so that hospitals could be built, one type C 1 and two type D, the second-phase rehabilitation of the ***Sekolah Penilik Kesehatan (SPK,*** *Health Inspector School) in Dili, the eradication of contagious disease, the supply of clean water, improvement of health and health facilities, the supply of medicines, providing toilets, upgrading of health personnel and improving service at hospitals in each District.*

In 1985, East Timor had the following health facilities: five hospitals with 475 beds, three of them are newly built such as the Central General Hospital in Dili with 300 beds, the General Hospital in Maliana and in Baucau, each with 50 beds; three Public Health Centres ***(Puskesmas),*** *each with 10 beds for overnight treatment; 28 Public Health Centres, 115 Auxiliary Public Health Centres and 48 Mobile Clinics as well as 132* ***Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu,*** *Integrated Services Post). The ratio of beds per population is 1 :: 1.000. These health services are supported by three pharmacies and five pharmacists.*

The existing medical personnel consist of 88 general practitioners, four specialists (one gynaecologist, one surgeon, one paediatrician, and one internist) and 11 dentists. They are assited by hundreds of nurses and scores of midwives. In East Timor, the ratio of doctor exceeds the average ratio of doctor in Indonesia. In this province, the ratio is 1 : 7.000, while the ratio of doctors at the national level is 1 : 13.000.

a. Nursing School

A Nursing School ***(SPK)*** *was opened in Dili in 1980 with 30 students. In 1983, this Nursing School graduated 27 nurses who were sent to the Public Health Centres. Efforts were made to expand the SPK's capacity of enrollement, and as of the 1983/1984 school year, SPK was able to accommodate 80 students. In this way it is expected that by 1986, SPK can produced 75-80 nurses annually. To date, the Dili Nursing School has produced 176 nurses. There is also education of medical personnel outside East Timor by sending 41 at the elementary level, 33 of the semi-academic level, 26 of the academic level, six at the university level and two post graduates.*

Public health improvement services are primarily aimed at the treatment and prevention of diseases which mostly affect the populace. In the fight againts malaria, the spraying with DDT has succeeded to reduce the malaria parasite rate, from about 50% - 75% in 1962 to 15% in 1985. Efforts of eradicating TBC have been conducted through the examination of 14.000 suspected sufferers and the treatment of 579 sufferers. In addition, treatment was given to 16.500 filaria patients and 35.918 persons treated for frambosia.

Preventive efforts for various contagious diseases have been through an immunization program with the emphasis on babies and children under five-year of age ***(Balita)*** *and pregnant women. An intensive implementation of this program was started in 1981, mainly aimed at preventing TBC, diphteria, tetanus, poliomyelitis and measles. To date, BCG immunization has been given to 23.361 babies, DPT immunization to 10.205 children, measles vaccination to 14.557 children, poliomyelitis immunization to 10.681 children and tetanus immunization to 7.099 pregnant women*

Along with improving public health, a nutritional improvement program has been carried out, especially for babies, children under the age of five years, pregnant women and nursing women. In 1982, a number of chidren under the five-years of age were involved in this program with 60% undernourished and 10% with poor nourishment. But, in the following year, the condition of ***Balita*** *children improved to 70% well-nourished, 25.2% undernourished and 4.2% poorly-nourished. Preventing endemic goitre was by injecting Lipidol to 13.200 patients, while a high dosis of Vitamin A is given againts xeropthalmia (night or day blindness) to 5.602 children under five-years of age. In order to monitor the nutritional condition of the children, 15.773* ***Kartu Menuju Sehat*** *(KMS, Toward-Good-Health Cards) have been filled and of these, an average of 7.058 children under five-years of age took part in the program.*

Improving environmental health is by constructing clean-water facilities in the villages, family toilets and liquid waste disposal units which started since 1980/1981. So far have been constructed : 13 preparatory units, one artesian well, 13 spring-water protection facilities, 52 rain water reservoirs, 3.400 shallow water hand pump units, 1.765 family toilets, 1.587 deep water hand pump units, 990 well units, 305 liquid waste disposal units and 22 facilities for washing, laundry and toilet.

b. UNICEF Aid

Since 1982, UNICEF has been assisting the child, mother and family welfare improvement program. These activities of UNICEF are in seven subdistricts, namely Luro, Iliomar, Iliatorali, Dilor, Natarbora, Laclubar and Turiscai. All are linked to the government's program to prevent overlapping.

To accelerate the reduction in rate of infant and child mortality of those below the five-years age and fertility, toward the realization of the Norm of a Healthy and Happy Small Family ***(NKKBS),*** *since 1984/85 were im-*

ju Sehat (KMS) dan yang aktif mengikuti program ini rata-rata 7.058 anak Balita.

Untuk meningkatkan kesehatan lingkunan telah dibangun penyediaan air bersih pedesaan, jamban keluarga dan sarana pembuangan air limbah, yang dilaksanakan sejak tahun 1980/1981. Sampai saat ini telah dibangun 13 unit persiapan, 1 sumur artesis, 13 unit perlindungan mata air, 52 unit penampungan air hujan, 3.400 unit sumur pompa tangan dangkal, 1.765 unit jamban keluarga, 1.587 unit sumur pompa tangan dalam, 990 unit sumur gali, 305 sarana pembuangan air limbah dan 22 unit sarana mandi, cuci dan kakus.

b. Bantuan UNICEF

Sejak tahun 1982, UNICEF membantu program peningkatan kesejahteraan anak, ibu dan keluarganya. Kegiatan UNICEF ini terdapat di tujuh kecamatan, yaitu di Luro, Iliomar, Ilatorali, Dilor, Natarbora, Laclubar dan Turiscai. Semua ini berkaitan dengan program pemerintah sehingga tidak terjadi program yang tumpang tindih.

Untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak Balita dan menurunkan fertilitas, menuju terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sejak tahun 1984/1985, dilaksanakan lima program terpadu yang terdiri dari Program Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA), Program Perbaikan Gizi, Program Imunisasi, Program Penanggulangan Diare dan Program Keluarga Berencana (KB).

Tujuan program KB di Timor Timur tidak semata-mata untuk membatasi angka kelahiran, melainkan juga menititberatkan kepada usaha peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengatur jarak kelahiran. Akseptor KB kini tercatat 6.062 orang. Sebagian besar akseptor menggunakan pil dan suntik disamping IUD. Untuk menunjang program KB ini terdapat 64 klinik KB.

4. Pendidikan

Secara keseluruhan tingkat pendidikan penduduk Timor Timur masih amat rendah. Bahkan sebagian besar belum pernah mengecap dunia pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, semenjak tahun 1976/1977 hingga tahun 1983/1984 Pemerintah Daerah membangun ruang kelas baru dan merehabilitasi ruang kelas lama.

Dalam tahun 1986 di wilayah ini terdapat 47 Sekolah Dasar (SD) dengan 13.501 murid dan 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan jumlah murid sebanyak 315 orang. Sejak tahun 1976 hingga tahun 1982 dibangun 984 ruang kelas SD disamping merehabilitasi 342 ruang kelas lama. Hingga bulan April 1986 di wilayah ini terdapat 498 Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah murid sebanyak 109.884 anak dan 2.978 guru. Taman Kanak-kanak yang baru berdiri sejak tahun 1980 dengan jumlah murid 22 anak, dalam tahun 1986 meningkat menjadi 17 buah dengan jumlah murid 1.666 murid.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah meluaskan dan memeratakan pendidikan diimbangi dengan pengangkatan guru-guru daerah yang hingga sekarang ini masih berstatus honorer dan penyediaan perumahan serta fasilitas lainnya. Disamping penyediaan buku-buku pelajaran kepada seluruh murid Sekolah Dasar. Sekarang ini terdapat 19 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terletak di Kabupaten Dili, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Covalima, Oekusi dan Manatuto dengan jumlah 2.474 orang murid dan 121 orang tenaga pengajar. Sekolah Teknik baru I (satu) buah terdapat di kabupaten Baucau dengan jumlah murid 76 orang dengan 5 (lima) orang guru. Sekolah Lanjutan Pendidikan Guru, SMA dan SMEA dengan jumlah siswa 286 orang dan tenaga pengajar berjumlah 15 orang. Saat ini siswa sekolah lanjutan tingkat atas yang sedang mengikuti pendidikan pada berbagai jurusan di luar Timor Timur sebanyak 76 orang dan 21 mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi. Lihat Tabel III-7 dan III-8.

Kursus-kursus yang telah dilaksanakan : Kursus Pelaksanaan Pendidikan Administrasi Pemerintah dan Pelajaran Bahasa Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun di Yogyakarta dan di Jakarta sejak tahun 1979, kursus Bendahawaran/Keuangan yang diselenggarakan di Selaputda Yogyakarta, pendidikan Bea Cukai bagi 30 siswa Timor Timur, kursus Juru Ukur Agraria yang diselenggarakan di Kupang dan Bali, kursus Brevet C untuk pegawai Dinas PU Timor Timur di Yogyakarta.

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Ujung Pandang, Bandung dan Banjarmasin dan pada tahun 1983/1984 dikirim pula sebanyak kurang lebih 10 calon mahasiswa dari Timor Timur pada Pemda Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Dalam rangka memenuhi keperluan pendidikan keterampilan kejuruan yang semakin mendesak di Timor Timur telah didirikan Sekolah Perawat, telah menghasilkan 70 orang siswa. Sekolah Pendidikan Guru di Dili telah menghasilkan 30 Guru, kursus Juru Ukur Agraria. Pendidikan Tinggi diselenggarakan pada : Institut Ilmu Pemerintahan 7 orang, Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2 orang, Universitas Indonesia 1 orang. Universitas Airlangga 2 orang sedang diantaranya akan menamatkan Pasca Sar-

*plemented five integrated programs, consisting of Mother and Child Welfare **(KIA)**, Nutrition Improvement, Immunization Program, Diarrhea Control and Family Planning **(KB)** Program.*

The Family Planning program in East Timor is not only aimed at limiting the birth rate, but also stresses the improvement of the health of mother and child through birth control. Presently, there are a total of 6.062 persons registered as acceptors, the majority of which are using pills and injections, in addition to IUD. To support this Family Planning (KB) program, 64 clinics were established.

4. Education

Overall, the educational level of the East Timorese is still very low. In an effort to overcome this problem, from 1976/1977 up to 1983/1984, the Regional Government built new classrooms and rehabilitated old ones.

*In 1976, in this area there were 47 Primary Schools **(SD)** with 13.501 pupils and two Junior High Schools **(SLTP)** with 315 pupils. From 1976 to 1982, 984 classrooms were constructed and 342 existing classrooms rehabilitated. By April 1986, there were 498 Primary Schools **(SD)** with 109.884 pupils and 2.978 teachers. Kindergaten which was started in 1980 with 22 children, increased to 17 in 1986 with 1.666 children.*

*The policy of the Regional Goverment to expand and to have equitable distribution of education is balanced with the appointment of teachers in the region who are still on an honorary status, and provide housing as well as other facilities, in addition to supplying textbooks to all Primary Schools pupils. Presently, there are 19 Junior High Schools which are located in the Districts of Dili, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Ermera, Covalima, Oekusi and Manatuto with a total of 2.474 pupils and 121 teaching staff. There is still one Technical School in Baucau District with 76 pupils and five teachers. At the Senior High School level, more are available in Dili, such as the Teachers' College, Senior High School **(MS)** and Economic Senior High School **(SMEA)** with a total of 286 students and 15 teaching staff. To date, 76 students of senior high schools are following education on various subjects outside East Timor and 26 students at various universities. (See table III-7).*

*The following courses have been arranged : training in Government Administration and the Indonesian language conducted eah year in Yogyakarta and in Jakarta since 1979; in treasury/finance arranged at the **Selaputda** in Yogyakarta. Training on customs duties for 30 East Timorese students. Surveyor courses for agrarian affairs conducted at Kupang and Bali. Brevet C courses for personnel of East Timor's Public Works Service in Yogyakarta. The Academy of Home Affairs Administration in Ujung Pandang, Bandung and Banjarmasin, and in 1983/1984, about 10 candidate students of East Timor were sent to the APBN in Riau, South Sumatra and West Sumatra. In meeting the increasing need in East Timor for vocational training, a Nursing School was established where 70 students already graduated. A Teachers' College in Dili has graduated 30 teachers. Higher Education at the Institute for Public Administration with seven persons, the Lembaga Administrasi Negara **(LAN,** National Institute of Administration) one person, the University of Airlangga two persons, while among them will complete.*

Post Graduate Study in Law. The University of Atmajaya with seven persons and other universities.

a. Universitas Terbuka (Open University)

East Timorese continuing their studies outside of the province, can make a choice of the various fields of science at the universities. Some of them have enrolled at Indonesia's best known universities, such as the University of Brawijaya (Malang), University of Gajah Mada (Yogyakarta) and the University of Pajajaran (Bandung).

Since 1984, the Government has started a remote lecturing system through the Open University in East Timor. The educational facilities are being utilized by graduates of senior High Schools (SLTA) of the 1984/1982 school year in which 659 students were registered.

In addition to formal education development, there have been effort also to promote the knowledge and intelligence of the people at large through Illiteracy Eradication and Community Educational Development programs. These programs are directed at those who during colonial rule were not given the opportunity to enter the world of education. And from 1976 up to 1986, 154.487 persons have followed the Illiteracy Eradication Program.

In order to spread knowledge to the East Timorese in an area as wide as possible through reading books, a Regional Library of the Department of Education and Culture was opened in Dili in 1983. In addition to the 19.509 books made available, the library is also equipped with three Mobile Libraries. As such, library services can be extended over a wider area. In the near future, libraries will be opened in Liquica and Aileu.

b. Guidance of the Younger Generation

Along with educational development, the guidance of the younger generation is carried out in accordance with developing the potentials of the generation. Various activities in this sector of guiding the younger generation, aside

Tabel / *Table III — 7*

JUMLAH : SEKOLAH, MURID DAN GURU NEGERI DAN SWASTA
DI TIMOR TIMUR PADA TAHUN 1986 / 1987
NUMBER OF SCHOOLS, STUDENTS AND TEACHERS, BOTH GOVERNMENT AND PRIVATE IS EAST TIMOR IN 1986/1987

No.	Nama Sekolah *Type of School*	Jumlah Sekolah *Number of Schools*	Jumlah Murid/ Mahasiswa *Number of students*	Jumlah Guru/Dosen *Number of Lecturers*	Keterangan *Remark*
1.	TK *Kindergarten*	19 Buah	1.619 Murid	46 Orang	—
2.	SD *Primary School*	540 Buah	126.740 Murid	3.359 Orang	—
3.	SLTP *Junior High School*	71 Buah	22.905 Murid	390 Orang	—
4.	SLTA *Senior High School*	26 Buah	7.308 Pelajar	381 Orang	—
5.	UNIVERSITAS TIMOR TIMUR/*University of Timor Timur (East Timur)*	1 Buah	444 Mahasiswa	30 Orang	3 (tiga) Fakultas
6.	UNIVERSITAS TERBUKA/*Open University*	1 Buah	659 Mahasiswa		—
	tiga fakultas/ *three faculties* *students students*				

Catatan
Universitas Timor Timur adalah Universitas Swasta dibawah Yayasan LORO SAE mempunyai 3 (tiga) Fakultas :
1. Fakultas Pertanian, 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 3. Fakultas Sosial dan Politik
Dibuka pada tahun 1986

Note : the University Timor Timur is a private university managed by the Yayasan (Foundation) LORO SAE and has three faculties :
1 Faculty of Agriculture
2 Faculty of Teacher Training and Pedagogy
2 Socio-political Faculty.
Opened in 1986.

Tabel / *Table III — 8*

MAHASISWA TUGAS BELAJAR
SCHOLARSHIPS STUDENTS

Tahun *Year*	Jumlah Mahasiswa *Number of Students*	Tempat *Location*
1978/1979	39	Malang, Surakarta, Semarang, Boyolali, Jombang dan Yogyakarta.
1980/1981	35	Kupang, Malang, Solo, Sukabumi dan Yogyakarta
1981/1982	15	Surakarta
1982/1983	9	Surakarta dan Yogyakarta

jana dalam bidang hukum. Universitas Atmajaya 7 orang dan pada perguruan tinggi lainnya. Lihat Tabel III-9 dan III-10.

a. Universitas Terbuka.

Putra Putri Timor Timur yang melanjutkan studinya ke luar Propinsi, memilih berbagai bidang ilmu pengetahuan di berbagai perguruan tinggi. Beberapa di antaranya menjadi mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi terkenal di Indonesia seperti Universitas Brawijaya (Malang), Universitas Gajah Mada (Yogyakarta) dan Universitas Pajajaran (Bandung).

Sejak tahun 1984, Pemerintah membuka sistem perkuliahan jarak jauh melalui Universitas Terbuka di Timor Timur. Sarana pendidikan dimanfaatkan oleh para siswa lulusan SLTA yang dalam tahun ajaran 1984/85, terdaftar sejumlah 659 mahasiswa.

Selain pembangunan di bidang pendidikan formal, juga dilakukan berbagai usaha untuk memajukan pengetahuan dan kecerdasan rakyat banyak, melalui program Pemberantasan Buta Huruf dan pengembangan Pendidikan Masyarakat. Program-program ini dilanjutkan kepada penduduk yang selama kolonialis masih berkuasa, tidak diberi kesempatan untuk mengecap dunia pendidikan sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1986, jumlah peserta program Pemberantasan Buta Huruf mencapai 154.487 orang.

Untuk memberikan pengetahuan seluas-luasnya melalui buku-buku bacaan bagi rakyat Timor Timur sejak tahun 1983, dibuka sebuah Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Dili. Selain memiliki 19.509 buku, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan 3 kendaraan Perpustakaan Keliling. Dengan tersedianya fasilitas perpustakaan mobil ini pelayanan buku-buku bacaan dapat lebih diperluas. Dalam waktu dekat akan dibuka perpustakaan di Liquica dan Aileu.

Tabel / *Table III — 9*

PENERIMA BEA SISWA/*Scholarships*

JUMLAH : PELAJAR, MAHASISWA TUGAS BELAJAR
IKATAN DINAS SAMPAI TAHUN 1986/1987
NUMBER OF STUDENTS RECEIVING SCHOLARSHIPS, STUDYING UNDER SERVICE CONTRACT WITH THE GOVERNMENT UNTIL 1986/1987

No.	Pelajar/Mahasiswa *Students*	Jumlah *Number*	Keterangan *Description*
1.	Pelajar dan Mahasiswa *Students*	480 Orang	Diluar Propinsi Timor Timur *Inside of East Timor's Province*
2.	Pelajar *Students (high school graduates)*	402 Orang	Didalam Propinsi Timor Timur *Outside of East Timor's Province*
3.	Ikatan Dinas *Under service contract with the government*	260 Orang	Non Pegawai Negeri Sipil. *Non-civil servant*
4.	Tugas Belajar *Study assignment*	236 Orang	Pegawai Negeri Sipil. *Civil servants*
J U M L A H ***TOTAL***		1380 Orang	—

Catatan :
Sampai Tahun 1986/1987 Putra/i kelahiran Timor Timur yang sudah berhasil dari Perguruan Tinggi tercatat sebagai berikut :
— Sarjana lengkap = 31 Orang.
— Sarjana Muda = 37 Orang.

Note : Up to 1986/1987, East Timorese recorded as having past higher education is as follows
— full degree 31 persons
— bachelor's degree — 37 persons

from the objective of channelling talents to all positive aspects, are also aimed at shaping dynamic personalities as well as to develop high social awareness and responsibility.

Local musical and dance groups are formed in each district of East Timor. On certain occasions, displays and festivals of regional music and dances are held, so that the younger generation can perceive the cultural elements of East Timor. In this way, the regional arts can be developed and preserved as well as help enrich the national heritage of Indonesian culture, and to date, hundreds of East Timorese songs have been recorded on numerous cassettes. Each year, an East Timorese art team participates in the Regional Dance and Music Week in the nation's capital, Jakarta. In the context of commemmorating the 40th anniversary of the independence of the Republic of Indonesia in Jakarta, the East Timor Regional Dance Team emerged as one of the ten top groups.

b. Pembinaan Generasi Muda

Sejalan dengan pembangunan di bidang pendidikan, pembinaan generasi muda juga dijalankan sesuai dengan pengembangan potensi generasi. Berbagai kegiatan di bidang pembinaan generasi muda ini selain ditujukan kepada penyaluran bakat-bakat ke segala aspek yang positif, juga diarahkan untuk membentuk watak yang dinamis serta menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Di setiap Kabupaten di Timor Timur dibentuk grup-grup musik dan tari setempat. Pada saat-saat tertentu diadakan pentas dan festival musik serta tari-tarian daerah, agar unsur-unsur kebudayaan Timor Timur dapat dihayati oleh generasi mudanya. Dengan demikian kesenian-kesenian daerah dapat dikembangkan dan dilestarikan serta turut memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia, kini ratusan lagu daerah Timor Timur direkam dalam belasan kaset. Setiap tahun, tim kesenian Timor Timur mengikuti Pekan Tari dan Musik Daerah di Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-40 di Jakarta. Tim Tari Daerah Timor Timur berhasil dalam 10 besar terbaik.

Dalam usaha pembinaan generasi muda kegiatan olahraga juga merupakan kegiatan yang paling banyak digemari. Dengan latihan secara rutin mereka sering mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga tingkat nasional. Pada Pekan Olahraga Nasional yang dilangsungkan di Jakarta tahun 1981 yang lalu kontingen Timor Timur menunjukkan partisipasi yang aktif. Dalam rangka pembinaan kegiatan olahraga ini, dicari bibit-bibit baru yang berbakat dan berprestasi. Pada tahun 1983, dilangsungkan Pekan Olahraga Daerah Timor Timur di Dili yang diikuti para kontingen dari seluruh Kabupaten. Dalam bulan September 1986 diselenggarakan Pekan Olahraga II Timor Timur di Baucau. Pada Pekan Olahraga Nasional XI, September 1985 yang lalu kehadiran kontingen Timor Timur sudah mulai diperhitungkan. Pada waktu itu, kontingen Timor Timur berhasil memperoleh 1 medali perak dan 1 medali perunggu dalam cabang olahraga menembak dan tinju.

Semenjak beberapa tahun yang lalu, peranan putra putri Timor Timur dalam menunjang dunia olahraga nasional semakin menonjol. Dua petinju asal Timor Timur, **Thomas Americo** dan **Francisco Lisboa,** tampil sebagai petinju petinju yang yang disegani di arena tinju Indonesia. Seorang diantaranya telah mempunyai reputasi internasional. Pada tahun 1985 didirikan Pusat Pendidikan dan Latihan Tinju di Dili. Selain cabang olahraga tinju, beberapa pemain sepakbola asal Timor Timur telah dilatih menjadi calon pemain kesebelasan nasional. Mereka berasal dari perkumpulan sepakbola ini masuk nominasi untuk menjuarai pertandingan antar klub se Indonesia, yang berlangsung di Malang dan Semarang. Dalam tahun yang sama seorang atlit Timor Timur berhasil merebut medali perunggu sebagai juara III dalam kejuaraan Atletik ASEAN di Bangkok.

c. P r a m u k a

Kegiatan pendidikan di luar sekolah juga banyak disenangi oleh para pelajar. Kegiatan pramuka yang merupakan salah satu kegiatan luar sekolah, sudah banyak terlihat, kontingen pramuka Timor Timur beberapa kali mengikuti kegiatan pramuka tingkat nasional, seperti jambore di Sibolangit (Sumatera Utara) dan di Samarinda (Kalimantan Timur). Jumlah anggota pramuka sampai Maret 1986 mencapai 46.852 orang.

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pembinaan generasi muda di Propinsi ini juga dilaksanakan dengan mengadakan penataran-penataran tentang kepemudaan, perkemahan, pertukaran pemuda antar propinsi se Indonesia dan ikut-serta dalam program Pemuda ASEAN serta program pertukaran Pemuda Indonesia Canada.

d. Sasaran Pelita II Bidang Pendidikan

Sementara untuk perluasan dan pemerataan pendidikan menuju tercapainya wajib belajar akan dibangun 4.900 ruang kelas baru, perbaikan 400 gedung SD Negeri, SD Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah. Pembangunan dimaksudkan untuk menampung lebih kurang 220.000 tambahan murid SD selama Pelita IV, yang terdiri dari anak usia sekolah 7 - 12 tahun dan anak usia diatas 12 tahun yang masih memerlukan pendidikan dasar. Selain itu akan dibangun 1 TKK. Sehubungan dengan ini diperlukan tambahan 5.700 guru SD termasuk 800 orang penjaga sekolah dan 15 guru TKK.

Pada tingkat SMTP akan dibangun 150 ruang kelas baru dan rehabilitasi 5 buah sekolah yang diperkirakan akan dapat menampung tambahan murid selama Pelita IV sebanyak 6.000 murid. Untuk ini diperlukan tambahan guru SMP sebanyak 1.700 orang dan tenaga Administrasi sebanyak 185 orang. Pada tingkat SMTA akan dibangun 6 unit SMA baru, 1 unit SMT Pertanian, 1 unit SMEA, tambahan ruang kelas baru 47 ruang untuk SMA, 1 ruang untuk SMEA, 5 ruang untuk SPG/SGO serta rehabilitasi 1 gedung SMEA dan 2 gedung SPG. Untuk itu diperlukan tambahan 108 guru dan 18 tenaga administratif untuk

The most popular activity in the efforts of guiding the younger generation is sports. With regular training they frequently participate in national sports meets. In the National Sports Week 1981 held in Jakarta, the East Timor contingent showed active participation. As part of sport promotion, there is continuous search for newcomers with talent and achievements. In 1983, a Regional Sports Week of East Timor was held in Dili, in which each District sent a contingent. In September 1986, the second East Timor's Sports Week was held in Baucau. In the XIth National Sports Week last September 1985, the presence of East Timor's contingent had to be taken into account. At that time, the East Timor contingent captured one silver medal and one bronze medal, respectively in shooting and boxing.

For the last several years, the role of East Timorese in supporting the national sports world has been continuously increasing. Two boxers from East Timor, ***Thomas Americo*** *and* ***Francisco Lisboa*** *have become highly respected in Indonesia's boxing circles, and one of them made an international reputation for himself. In 1985 was established in Dili the Boxing Training and Education Centre. In addition to boxing, several soccer players from East Timor have been trained as candidates for the national team. Their home-team is "Orient Star" in Dili. In 1983, the Orient Star was nominated to win the inter-Indonesian soccer club competition held in Malang and Semarang. In the same year, another athlete from East Timor won a bronze medal, third place, in the ASEAN Athletic Championships held in Bangkok.*

c. Scout Movement

Educational activities outside the school or extra-curricular activities are also very popular among the students. One of them is the scout movement. Several times the East Timor Contingent participated in scout activities at national level, such as the Jamboree at Sibolangit (North Sumatra) and in Samarinda (East Kalimantan). By March 1986, the number of scouts registered was 46.852.

In addition to these activities, guidance of the younger generation in this Province is also carried out through upgrading courses on youth, camping, inter-provincial youth exchange, participation in the ASEAN Youth Program and the Indonesian-Canadian Youth Exchange Program.

d. Objectives of Pelita II in the Education Sector

To expand and to have equitable distribution of education with the objective of achieving compulsory education, 4.900 new classrooms will be constructed, 400 Primary Schools - State and Private as well as Religious ***(Ibtidaiyah)*** *will be repaired. The construction is aimed at accommodating about 220.000 additional pupils of Primary Schools during Pelita IV, which consist of children age 7 - 12 years and those over the age of 12 years, but still requiring basic education. Furthermore, one Kindergarten* ***(TKK)*** *will be built. In this connection, an additional of 5.700 Primary School teachers are required, including 800 school guards and 15 Kindergarten teachers.*

At the Junior High School ***(SMTP)*** *level, 150 new classrooms will be built and five schools rehabilitated and expected able to accommodate an additional 6.000 pupils during Pelita IV. For this is required an addition of 1.700 teachers for* ***SMP*** *and some 185 Administrative personnel. At the Senior High School* ***(SMTA)*** *level, will be built six new SMA units, one unit Agricultural Senior High School, one unit Economic Senior High School* ***(SMEA),*** *47 new additional classrooms for* ***SMA,*** *one classroom for* ***SMEA,*** *five classrooms for Teachers' College/Sports' Teachers College as well as rehabilitating one* ***SMEA*** *building and two* ***SPG*** *(Teachers College) buildings. For such purpose are required : an additional 108 teachers and 18 administrative personnel for Senior Technical School* ***(STM)/SMT Pertanian*** *(Agriculture), 23 teachers and 3 administrative personnel for* ***SMEA,*** *18 teachers and 3 administrative personnel for* ***SMKK,*** *43 teachers and 6 administrative personnel for* ***SPG/SGO/KPG.***

In order to improve quality, the following will be provided : textbooks, books for the library, display tools, tools for skill training and teacher's upgrading, Head Master, Suvervisor Kindergarten/Primary School ***(TK/SD),*** *inspector for SMTP/SMTA. In addition will be built: two rooms for physics laboratory of* ***SMP*** *and one for* ***SMA,*** *tools for learning mathematics, physics practical tools for* ***SPG/SMA*** *and practical learning tools for vocational schools.*

Improving public education through integrated basic education will involve the training of 299.000 persons, between 7 - 14 years old and still handicapped by the three blinds. In this respect will be trained 4.350 tutors/monitors and will be provided 1.660.000 of book package-A and the accessories, 1.600 units of learning facilities, five sets and 102 working aid books and work facilities and five ***SKB.***

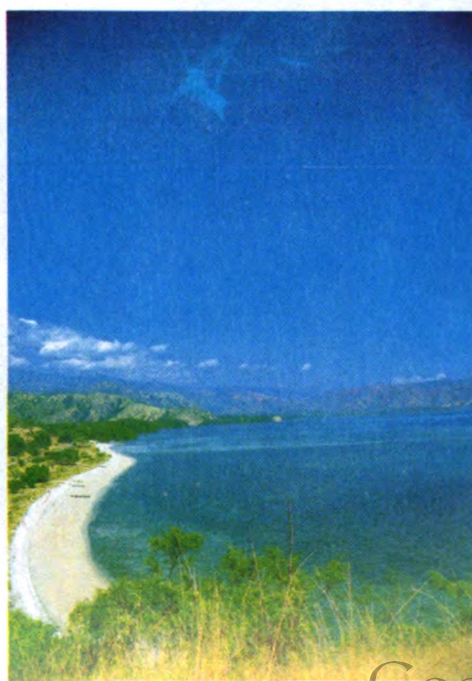
Through the guidance of the younger generation will be trained personnel for guiding 50 of the youth, between the age of 15-30 years. The Scout Movement will guide 2.000 juniors as well as training 550 technical personnel and 400 counsellors/trainers on scouting, the construction of a Cadika/youth centre building and providing 15 packages of training tools.

Berbagai kesenian daerah dan keadaan alam yang memperkaya daerah ini sebagai obyek wisata. Dalam gambar antara lain terlihat remaja puteri sedang mempragakan tari-tarian untuk menyambut kedatangan tetamu dengan pakaian khas daerah yang dimeriahkan juga oleh Gubernur Timor Timur dan Ibu. Sedang gambar lainnya menggambarkan keindahan pantainya dengan pasir putihnya, serta sebuah monumen yang berdiri kokoh di tengah-tengah kota Dili.
Some traditional arts and natural beauty in this Province are potential to be promoted as tourist objects. A picture depicts a young maiden in regional costumes demonstrating a typical dance to welcome guests, also attending by Governor of Timor Timur and his wife. Other pictures illustrate the beauty of a seashore with white sand, and a sturdy monument in the midst of Dili town.









Kemajuan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Timor Timur menuntut kehadiran lembaga keuangan sebagai pendukungnya. Seperti terlihat dalam gambar berbagai lembaga keuangan perbankan telah beroperasi di daerah ini, sedang gambar lainnya terlihat kesibukan para karyawan perbankan melayani masyarakat.

The progress and the promotion of economy in East Timor Province require the presence of financial intermediaries to support them. On the pictures are various kinds of financial intermediaries already in operation in this region. Other pictures show bank employees being busy serving the people.









Perkembangan industri daerah ini sudah mulai menyamai perkembangan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Seperti terlihat dalam gambar beberapa industri kecil mulai menampakkan hasilnya, antara lain industri batako, industri kerajinan tangan berupa kain dan proses pembikinan topi.

The growth of industry in this region has started to catch up with the progress of industry in other region of Indonesia. Pictures illustrate a few small-scale industries with their products such as "batako", a kind of brick; handicrafts of cloth; and the process of making hats.

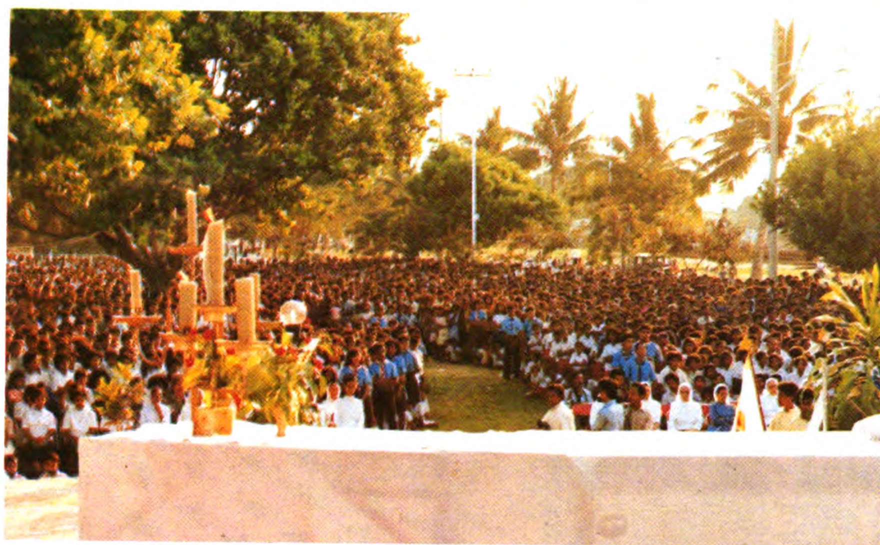






Keanekaragaman agama yang dianut penduduknya, bukanlah hal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. Bahkan peranan umat beragama dalam mensukseskan pembangunan sangat besar. Terlihat dalam gambar berbagai sarana peribadatan yang telah dibangun di daerah ini.

The diversity of religion proffessed by the population does not constitute any handicap for them to live peacefully, hand-in-hand. Even the role of religious adherents in making the development a success is very big. Pictures show numerous kinds of places of worship.



Pendidikan dan ketrampilan, mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hadirnya generasi yang trampil dan cerdas, merupakan dambaan kita semua. Untuk itu upaya menuju tahap tinggal landas diperlukan insan yang cerdas dan trampil. Dalam gambar berbagai kegiatan ketrampilan yang dilakukan para pelajar di daerah Timor Timur.

Education and skill can not be separated from one another. The existence of intelligent, skilled younger generation constitutes an ideal expectation. With such younger generation, the taking-off period of development will run smoothly. Pictures illustrate different kinds of vocational activities being carried out by students in East Timor Province.









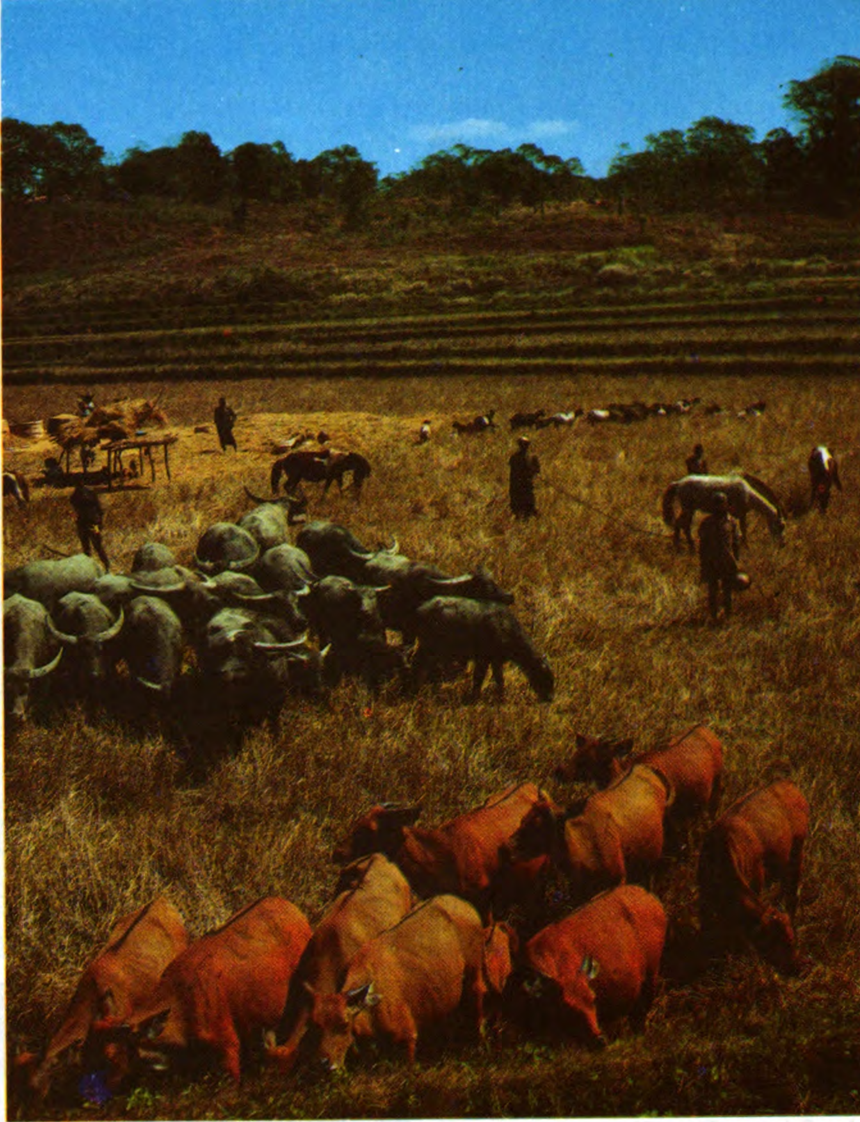






Melalui pembangunan kesehatan diharapkan tercipta masyarakat yang sehat fisik dan rohani. Karena hanya manusia yang sehat rohani dan jasmani yang dapat menopang pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah banyak membangun berbagai sarana kesehatan. Dalam gambar terlihat Rumah Sakit Umum Pusat Dili sedang dikunjungi oleh tamu dari luar negeri dan kegiatan imunisasi anak balita.

Through the development of health, it is expected that the people will be physically and spiritually healthy. Since manpower is one of the biggest assets of the national development, the Regional Administration has developed various kinds of health facilities. Appearing on the pictures are the Central General Hospital in Dili visited by guests from overseas; and the immunization of under-five children.



Timor Timur secara keseluruhan daerahnya potensial untuk pertanian. Di beberapa daerah tertentu sangat cocok diusahakan tanaman pangan dan beberapa daerah lainnya cocok untuk mengembangkan peternakan. Seperti dalam gambar betapa subur lahan pertanian padi daerah Meliana serta peternakan kerbau yang umumnya gemuk-gemuk.

The area of East Timor Province in general is potential agricultural land. Some particular areas are suitable for food crops, while others are very good for animal husbandry. Pictures show fertile agricultural land for rice cultivation in Maliana area; and prospering buffalo breeding.







Peran serta wanita dalam kegiatan pembangunan di daerah ini telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Dalam gambar terlihat berbagai kegiatan PKK yang dilaksanakan dan mendapat kunjungan dari badan sosial negara sahabat yang sedang berkunjung ke Timor Timur beberapa waktu lalu. Tampak juga Ibu Gubernur Timor Timur.

The participation of women in development activities in this region is promising. Pictures illustrate numerous kinds of PKK activities (Promotion of Family Welfare), attended by overseas social institute officers sometime ago. East Timor Governor's wife also appeared on the picture.





STM/SMT Pertanian, 23 guru dan 3 tenaga administratif untuk SMEA, 18 guru dan 3 tenaga administratif untuk SMKK, 49 guru dan 6 tenaga administratif untuk SPG/SGO/KPG.

Guna meningkatkan mutu akan disediakan buku pelajaran pokok, buku perpustakaan, alat peraga, alat keterampilan serta penataran guru, Kepala Sekolah penilik TK/SD, dan pengawas SMTP/SMTA. Disamping itu akan dibangun 2 ruang laboratorium ilmu alam untuk SMP dan 1 ruang untuk SMA, alat pelajaran matematika, alat praktek ilmu alam untuk SPG/SMA dan alat pelajaran praktek untuk sekolah kejuruan.

Peningkatan pendidikan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dasar yang terpadu dengan upaya pendidikan, akan dilatih 299.000 orang usia 7 - 14 tahun yang masih menyandang 3 buta. Untuk itu akan dilatih 4.350 orang tutor/monitor. Bagi keperluan tersebut akan disediakan 1.600.000 buku paket A dengan kelengkapannya, 1.800 unit sarana belajar, 5 set dan 102 buku sarana kerja dan pembangunan 5 SKB.

Melalui pembinaan generasi muda akan dilatih tenaga pembina sebanyak 50 pemuda usia 15 - 30 tahun. Gerakan pramuka akan membina 2.000 anak remaja dan akan melatih 550 tenaga teknis serta 400 tenaga pembina/pelatih kepramukaan, membangun gedung Cadika/gelanggang pemuda dan mengadakan 15 paket alat latihan.

Program mengolahragakan masyarakat dengan membina 246.000 warga masyarakat termasuk penyandang cacat serta 103.000 pelajar dan mahasiswa. Usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pemanduan bakat bagi 340 orang. Selain itu akan disiapkan guru pelatih, pembina dan penggerak olahraga serta pengadaan sarana olahraga dan buku olahraga.

5. Aparatur Pemerintahan

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Pemerintahan di Timor Timur, arah kebijaksanaan yang ditempuh ditujukan kepada :

a. Pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah sampai dengan Tingkat terbawah dengan memanfaatkan potensi tenaga yang ada, disamping mengusahakan tambahan-tambahan tenaga yang berpengalaman didalam mengisi kekosongan personil pada unit-unit organisasi yang masih lowong.
b. Mengadakan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban secara terus-menerus sehingga diharapkan peningkatan kualitas aparatur Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat terbawah mampu mengemban tugas secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
c. Untuk terciptanya pelaksanaan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, perlu dibina hubungan yang serasi dan harmonis antara lembaga-lembaga perwakilan rakyat dengan Pemerintah di tingkat daerah. Sehingga diharapkan menghasilkan produk-produk bermanfaat bagi kepentingan serta kemajuan daerah. Terutama dalam rangka penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang ada pada akhirnya diharapkan dapat menghimpun dana bagi penunjang pembangunan daerah.
d. Di Tingkat Desa ditingkatkan peranan aktif Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan Lembaga-lembaga Pembangunan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan menggerakkan partisipasi masyarakat desa untuk ikut-serta dalam pembangunan, penyelenggaraan administrasi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.
e. Agar berhasil apa yang menjadi sasaran pembangunan bidang Aparatur, disamping dilakukan penyempurnaan terhadap syarat-syarat Pemerintah Daerah yang terlihat dalam pelaksanaan pembangunan, dipikirkan pula langkah-langkah penyempurnaan sarana yang menunjang suksesnya pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan langkah-langkah pendayagunaan aparatur Pemerintah diterapkan pendekatan secara menyeluruh. Mengingat pendekatan secara menyeluruh akan mencakup ruang lingkup luas, pendayagunaan aparatur Pemerintah secara terus-menerus, bertahap dan berencana didasarkan atas prioritas yang disesuaikan dengan prioritas pelaksanaan pembangunan Nasional.

Dalam rangka penyempurnaan secara menyeluruh itu, usaha-usaha penyempurnaan dilakukan dengan memperhatikan azas-azas administrasi yang bersifat dasar. Dalam penerapannya selalu disesuaikan dengan keadaan dan keperluan administrasi sehingga diperoleh administrasi Pemerintah yang berdayaguna dan berhasilguna. Dalam penyempurnaan administrasi dan aparatur Pemerintah diperhitungkan adanya pembatasan-pembatasan yang tidak dapat dilampaui. Seperti kebijaksanaan yang tingkatnya lebih tinggi, keterbatasan anggaran dan jumlah pegawai yang tersedia.

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, usaha pendayagunaan aparatur Pemerintah meliputi bidang-bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Within the scope of the program to make sports popular in the community, 246.000 citizens will be trained, including invalids as well as 103.000 pupils and students. Efforts of promoting and enhancing sports achievements are carried out through counselling and talent scouting on 340 persons. In addition to trainers will be prepared counselors and prime movers of sports, as well as providing sports' facilities and books on sports.

5 Government Apparatus

To improve the effectiveness of implementing basic Administration duties in East Timor, the course of policy will be aimed at :

a Making effective the Regional Government's apparatus up to the lowest Level by utilising the available personnel potential, in addition to efforts of adding experienced personnel to fill vacancies at organizational units.
b continuously guiding, perfecting and putting in order so that improvement can be expected in the quality of Regional Administration's apparatus up to the lowest level in assuming duties effectively, efficiently, cleanly and with authority.
c the realization of a real and responsible autonomy which require promoting harmonious relationship between people's representative institutions with the Administration at regional level, so that beneficial products can be expected for the region's interest and progress. Especially within the scope of extracting regional income resources with the hope that finally it will accumulate funds to support regional development.
d stepping up at the Village Level the active role of Rural Community Institution (LMD) and the other Development Institutions in implementing rural development by setting in motion rural community participation to join in the development, executing rural administration in line with Act No 5 of 1979.
e assuring success which is the objective of development in the Apparatus sector, that besides carrying out perfection with regard to Regional Government's provisions as observed in the implementation of development, steps should also be considered in perfecting facilities which support the success of performing the assignment.

In carrying out steps for an efficient Government apparatus, an overall approach is applied. As this approach covers a wide scope, the making of an efficient Government apparatus continuously, is stages and planning based on priorities adjusted to those of national development implementation.

Within the scope such overall perfection, efforts taken shall consider basic principles of administration. In applying, there shall be continuous adjustment to administrative conditions and requirements, so that an efficient and effective Government administration will be achieved. In improving Government's administration and apparatus, consideration shall be given to existing limits that cannot be crossed, such as higher policy, limited budget and personnel available.

By applying those approach, efforts in making an efficient Government apparatus include sectors of institution, personnel and management.

Efficiency of Institutions

An efficient Regional Government Apparatus in Pelita IV is a continuation of efforts from previous development periods.

Performing Regional Administration is based on Law No 5 of 1974 concerning basic perciples of Regional Administration. In that Law is stated that Presidential Decrees and various Decisions of the Minister of Home Affairs stipulate Organization at Regional Level, such as Organization of the Regional Territory's Secretariat, Inspectorate of the Provincial Territory and Organizations of other Staff Bodies.

For the sake of enhancing the effectiveness of Government's Apparatus, an immediate start was made in constructing physical infra-structure and other facilities, such as office buildings, official residences as well as telephone network connecting Bureus as the Governor's office with services at the Districts and Sub-Districts. This was in view of the relative backward condition of East Timor's Regional Government if compared with other areas in Indonesia. For a smooth implementation of development and an equitable distribution of its results, a harmonious working relation shall be continuously stepped up and stabilized between the Provincial Government and District Administration as well as Regional Bodies/Institutions.

Efficiency of General

Administrative Management

Making general administration efficient is aimed at smooth development implementation. In addition to preventing waste and deviation from performing government duties and development. The basic principle of making general administration efficient is the increase in efficiency of Government activities and development.

For the purpose of analysis, formulation and determination of policy as well as steps of Government apparatus which should be objective, accurate and prudent in general, it is necessary to develop a good information system

Demi peningkatan efisiensi pendayagunaan Aparat Pemerintah, pembangunan prasarana fisik dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti gedung-gedung perkantoran, rumah-rumah jabatan serta pembangunan jaringan telpon yang menghubungkan Biro-biro di Kantor Gubernur dengan Dinas-dinas di Kabupaten dan Kecamatan segera dilaksanakan. Mengingat Pemerintah Daerah Timor Timur relatif terbelakang, jika dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia.

Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, hubungan kerja yang serasi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta Badan/Lembaga Daerah terus ditingkatkan dan dimantapkan.

Pendayagunaan Ketatalaksanaan Administrasi Umum

Pendayagunaan administrasi umum ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan. Disamping itu ditujukan pula untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan. Inti pokok pendayagunaan administrasi umum adalah peningkatan efisiensi kegiatan usaha Pemerintah dan pembangunan.

Untuk kepentingan analisa, perumusan dan penetapan kebijaksanaan serta tindakan-tindakan aparatur Pemerintah pada umumnya bersifat obyektif, tepat, konsisten dan bijaksana, perlu dikembangkan sistem informasi yang baik di tingkat daerah. Untuk mendukung sistem informasi, sistem pengelolaan dokumentasi, pengelolaan kearsipan, pencatatan data dan perstatistikan kearsipan ditujukan untuk pemeliharaan dan pengamanannya serta kemudahan untuk dimanfaatkan.

Untuk mendukung sistem informasi ditingkatkan sistem monitoring dan sistem-sistem pelaporan, sehingga informasi dapat sesuai dengan perkembangan keadaan.

Disinilah letak pentingnya didirikannya suatu Biro Statistik yang kuat pada Kantor Gubernur, yang dilayani tenaga-tenaga ahli yang dilengkapi dengan perangkat komputer.

Pendayagunaan Pengawasan dan Penertiban

Untuk mencegah pemborosan, penyimpangan dan kebocoran serta menjamin keberhasilan tugas-tugas umum Pemerintah dan Pembangunan, sistem pengawasan dan penertiban terus ditingkatkan.

Dalam Pelita IV pelaksanaan pengawasan diusahakan lebih terpadu dan terarah, agar pelaksanaan program-program sesuai dengan yang direncanakan. Disamping itu bobot pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan sebagai tindakan preventif.

Pendayagunaan Kepegawaian

Usaha menetapkan formasi yang sehat sebagai dasar pengadaan pegawai, maka diadakan inventarisasi ulangan jabatan, penyusunan uraian jabatan, analisa dan penilaian jabatan serta penentuan persyaratan jabatan.

Mengingat Timor Timur mempunyai latar belakang yang khusus, untuk sementara waktu hal ini mungkin dapat ditunda sampai saatnya mengijinkan. Meskipun demikian dalam jangka pendek para pegawai negeri sipil yang masih buta huruf, baik yang berada di Tingkat I maupun Tingkat II, diusahakan untuk dapat membaca dan menulis. Sedangkan untuk mengisi kelemahan-kelemahan didalam formasi perlu diadakan suatu "crash program" dengan mendatangkan sarjana-sarjana dan sarjana muda ekonomi dari luar daerah untuk dikerjakan di Dinas Perindustrian, atau insinyur-insinyur pertanian di Dinas Pertanian.

Disamping itu untuk tiap-tiap Dinas di Kantor-Kantor Kabupaten akan ditempatkan sarjana-sarjana muda dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan tugas Dinas-Dinas tersebut.

Kemudian untuk meningkatkan ketrampilan pegawai-pegawai sipil tertentu yang menduduki jabatan-jabatan penting, akan tetapi latar belakang pendidikan atau pengalamannya masih lemah, secara bergiliran dapat dikirim keluar daerah untuk mengikuti latihan-latihan jabatan bagi yang memenuhi syarat supaya diberikan kesempatan untuk bertugas belajar di pusat-pusat studi di dalam maupun di luar negeri guna menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang yang ditanganinya.

Pemukiman dan Perumahan

Desa-desa di wilayah Timor Timur tersebar di 61 kecamatan. Umumnya keadaan pemukiman terisolir di daerah pegunungan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai tempat tinggal. Pemukiman penduduk tidak teratur dan terarah. Sehingga sulit untuk menyusun pola pembinaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah mengadakan penataan sistem pemukiman secara bertahap, disamping menghilangkan kebiasaan di daerah pegunungan yang hidup dengan sistem perladangan berpindah-pindah.

at regional level. To support this system of information, the system of managing documentation, archieves, data recording statistics shall be aimed at maintaining, safeguarding and practical use.

In order to support the information system, monitoring and reporting systems shall be improved so that the information is in accordance with development of the situation.

Here lies the importance of establishing a good Bureau of Statistics at the Governor's office which is staffed by experts and provided with computers.

Efficiency of Control and Orderliness

To prevent waste, deviation and leaks as well as to secure the success of general tasks of Government and Development, the system of control and orderliness will be constinuously enhance.

In Pelita II, efforts were made to have more integrated and directed control, so that program implementation is according to planning. In addition, the accent of control was more on prevention.

Personnel Efficiency

In establishing a sound formation as the basis for providing personnel, a new inventory is carried out on positions, job descriptions, analysis and job evaluation as well as determining position requirements.

In view of East Timor's background, this could be temporarily postponed until the appropriate time. Nevertheless, in the short term, efforts are made so that illiterate civil servants at the Provincial and district level can read and write. While to overcome weakness in the formation, it is necessary to carry out a crash program by recruiting university graduates and those with bachelor's degree in economics from outside the area for employment in the Industrial Service, and university graduates or agricultural engineers in the Agricultural service.

Furthermore, those with bachelor degrees will be assigned in each Service of District Offices in their respective fields.

Afterwards, to upgrade the skill of civil servants occupying certain important positions, but with inadequate educational background or experience, by turns they will be sent on job training outside the area, while those meeting the requirements are sent within as well as outside the country on a study grant at educational centres to gain additional knowledge and experience in their respective sector.

Settlement and Housing

The villages in East Timor province are spread in 61 Sub-Districts. The settlements are generally isolated in mountainous area and do not meet the standards of housing. The settlements are disorganiced and without direction, making it difficult to formulate a design for guidance and enhance people's welfare. Therefore, the Government has reorganized gradually the settlement system, in addition to eliminating the habit of living in mountainous ar as with a shifting agricultural system

Organising settlement in this area is in line with the program of family members' reunion that were separated during the period of turbulence.

For people living in the ubran areas, houses were built and adjusted to their buying power. In 1982, 527 low-cost houses were inaugurated in Dili. The construction of low-cost houses is intended for the public at large, especially those in the medium and low-income bracket. Payment is made in very low installments over a priod ranging between five to 20 years.

In Pelita IV, the construction of low-cost and basic housing in Dili has been expanded and settlements in 80 villages restored and sources of clean water supply expanded. There is in Dili a clean water supply of 56 litres/second, in Baucau 51 litres/second and in Aileu, improvement of clean water supply is nearing completion.

Overcoming people's scattered settlement is by organising the settlement system through examples which aere easy to understand and to copy with the hope to raise their living standard. Therefore, the Government considers it necessary to carry out a transmigration program by transferring model farmers from other areas, especially from Java and Bali.

Such program is directed at areas which in the next 15 years can be classified as having a population density of 50 persons per square km, areas with wide acreage of agricultural potential and able to accomodate settlement design as well as belonging to territorial development to support cross-sectoral development program.

The applied design of transmigration settlement, the 50% : 50% design, i.e. 50% of the settlers are newcomers while the other 50% are the local populace. Up to March 1986, the size of land reserved for transmigration location is 4.988 ha, of which 3.300 ha already occupied by transmigrationts. Among the objective of the 50% : 50% settlement design is to reorganize the settlement of local populace in order to become new settlement with the possibility of better development, as well as establishing new settlements by combining the newcomers with the local populace, resulting in transfer of knowledge and skill as well as cultural adaptation. The stationing of model farmers in East Timor Province was from December 1982 till 1986.

Pendayagunaan Kelembagaan

Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah dan Pelita IV merupakan kelanjutan dan langkah-langkah usaha yang dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya.

Penyelenggaaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Keputusan Presiden dan berbagai Keputusan Menteri Dalam Negeri telah diatur Organisasi Perangkat Daerah, seperti Organisasi Sekretariat Wilayah Daerah, Inspektorat Wilayah Propinsi, serta Organisasi Badan-Badan Staf lainnya.

Penataan pemukiman di daerah ini diatur sejalan dengan program mempersatukan kembali (Reunion) anggota keluarga yang selama masa pergolakan tercerai-berai.

Untuk penduduk yang menetap di daerah perkotaan, dibangun perumahan dan disesuikan dengan kemampuan. Dalam tahun 1982 di Dili diresmikan penempatan 527 rumah sederhana. Pembangunan rumah sederhana ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, terutama yang berpenghasilan sedang dan rendah. Pembayaran melalui angsuran yang sangat ringan, berjangka waktu 5 hingga 20 tahun.

Dalam Pelita IV diperluas pembangunan rumah sederhana dan rumah inti di kota Dili dilakukan pemugaran pemukiman 80 desa. Sehubungan dengan itu, diperbaiki instalasi dan pipa serta perluasan sumber air bersih. Penyediaan air bersih 56 liter/detik di Dili, 51 liter/detik di Baucau dan di Aileu peningkatan air bersih dalam tahap penyelesaian.

Upaya untuk mengatasi pemukiman rakyat yang terpencar-pencar adalah dengan cara menata sistem pemukiman serta memberikan masukan-masukan kepada masyarakat setempat berupa conoh-contoh yang mudah dimengerti dan ditiru dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Karena itu pemerintah menganggap perlu menyelenggarakan program transmigrasi dengan mendatangkan petani teladan dari daerah lain khususnya Pulau Jawa dan Bali.

Program tersebut diarahkan pada daerah-daerah dengan klasifikasi dimana dalam jangka waktu 15 tahun mendatang kepadatan maksimal 50 jiwa per km^2, daerah yang potensial untuk pertanian dengan areal yang luas dan mampu mendukung pola pemukiman serta daerah yang termasuk dalam kawasan pengembangan wilayah untuk menunjang program pembangunan lintas sektoral.

Pola pemukiman transmigrasi yang diberlakukan, pola 50% : 50%, yaitu 50% pemukim berasal dari daerah pengirim dan 50% lainnya berasal dari penduduk setempat. Sampai dengan Maret 1986, areal pencadangan tanah yang ditetapkan untuk lokasi transmigrasi seluas 4.988 Ha, 3.300 Ha diantaranya telah ditempati para transmigran. Pola pemukiman 50% : 50% dilakukan antara lain dengan tujuan menata kembali pemukiman penduduk setempat menjadi pemukiman baru yang memungkinkan bisa berkembang lebih baik serta membentuk pemukiman baru dengan penggabungan penduduk pendatang dengan penduduk setempat agar terjadi alih pengetahuan dan ketrampilan serta adaptasi kebudayaan. Penempatan Petani Teladan ke Propinsi Timor Timur dimulai Desember 1982 hingga tahun 1986.

Penerangan

Masalah utama dalam menjalankan misi penerangan di daerah ini adalah bahasa Indonesia yang merupakan alat komunikasi justru belum dikuasai masyarakat. Khususnya mereka-mereka yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan sensus tahun 1980, sekitar 66,7% penduduk hanya dapat berbahasa daerah dan sekitar 76,6% masih buta huruf. Mereka hanya mempergunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa Portugis dalam upacara resmi, baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Kemudian masalah keadaan geografi dan sarana perhubungan sangat membatasi ruang gerak operasional penerangan. Disamping tingkat sosisal ekonomi (termasuk pendidikan dan pengetahuan) masyarakat sangat rendah. Faktor-faktor tersebut berdampak sangat besar dalam menentukan kebijaksanaan penerangan. Terutama dalam menumbuhkan motivasi masyarakat berpartisipasi dalam membangun daerahnya, dalam kaitan dengan pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari hal ini, Pemerintah melalui Departemen Penerangan, berusaha terus-menerus agar peranan penerangan dâpat berjalan lancar dan berfungsi baik.

Pada prinsipnya pelaksanaan operasional penerangan di Timor Timur dilaksanakan dengan : (a) penerangan tatap muka, (b) pameran, (c) pertunjukan film dan pertunjukan rakyat, (d) penerbitan (media cetak). Keseluruhan kegiatan tersebut mengandung unsur yang berhubungan dengan kesadaran dan tanggung jawab bernegara, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, pertanian dan sektor-sektor lainnya.

Information

The main problem in carrying out the mission of information in this area is the Indonesian language which is the medium of communication, but not yet mastered by the community, particularly those living in the rural areas. Based on the 1980 census, about 66.7% East Timorese spoke the local dialects and about 76/6% were illiterate. In their daily life they had been using local dialects and Portuguese at official ceremonies, offices as well as schools. Then came the problem of geography and communication facilities which severely restricted the operations of information. Furthermore, the socio-economic level (including education and knowledge) of the community was very low. Those factors had considerable impact on defining the information policy, especially in motivating the public to participate in the development of their region, in the context of National Development.

With those factors in mind, the Government through the Departement of Information, has been unrelenting in its efforts to keep the role of information run smoothly and performing well.

In principle, operations of information in East Timor are carried out by way of : (a) face-to-face communications, (b) exhibitions, (c) film shows and public shows, (d) publications (the printed media). All those activities contain elements related to national, socio-cultural, economic, education and agricultural consciousness and responsibility, and that of the other sectors.

a. Television Distribution

With the construction of a television relay station, 116 television sets were distributed to the public in 1979. In 1980, another 120 public television sets were distributed and up to 1985, there were 1.982 public television sets. The availability of these facilities means that via the Jakarta television station, the people of East Timor can follow not only national developments, but also international events. Through this electronic medium, the curtain of their isolation on information has been lifted.

b. The Printed Medium

Information services provided through the period medium have also received government's attention with the publication of several brochures, bulletins and newspapers. With the increased reading and writing ability, information through the printed medium will play an increasing role, particularly with the younger generation still going to school. Through them the news can be channeled or passed to their elders who are still illiterate.

In 1982/1983, the "DILI POS" weekly started its publication and also elected to implement the "Newspapers Entering thé Villages" (KMD) in the Province of East Timor. Dus to various technical problems, the publication of "Dili Pos" was not as expected. In 1985 was established the "TATOLI NAROMAN" Foundation with the purpose of publishing a new newspaper, the "SUARA TIMOR TIMUR" (Voice of East Timor) which will be the newspaper for the KMD-program.

To improve information services, mainly in the regions, Public Information Centres (Puspenmas) are established in Dili, Baucau, Ainaro, Maliana, Pante Makasar (Ambenu), Liquica, Gleno (Ermera) and Suai. It is planned to gradually provide all districts with Public Information Centres. (See table III - 10)

c. Radio Republik Indonesia

A Radio Republik Indonesia (RRI) station was constructed in Dili in 1981 with a transmitting power of one Kwh. RRI Dili is on the air 24 hours a day and can reach the whole territory. Through this medium news are sent out which can expand the scope of knowledge of the public, such as the Government programs on the development of East Timor, religious broadcasts, women's programs, intorducing other areas of Indonesia, science and entertainment programs in the form of regional music and songs. Most of the programs are in the Indonesian language. Nevertheless, at certain times of the day, the broadcast is in Tetun, the local language.

Furthermore, in 1982, 5.000 radio cassettes were distributed to headmasters, heads of villages and their secretaries throughout the provinces.

Mining

Research and exploration conducted by Allied Mining Corporation Pty Ltd. (1937), Japan Development Consultant Inc. (1974) as well as by the Directorate of Natural Resources (1984, 1985) Project for the Development of Mining and Energy, Region III - Ujung Pandang - particularly by the Project Sector of Mining and Energy, East Timor Region (1984, 1985) and other information, a temporary result has been obtained on the Potential of Mineral Resources in the East Timor Region, as shown in Picture 7.

The abovementioned Potential of Mineral Resources is as follows :

a Vemasse area (Baucau District)

Sediments associated with clay of the Bobonaro formation, in the shape of intercalation at the bedding plane, of red clay subject to distortion as a result of tectonic gravity. In addition, there are nodule forms and thin lenses.

a. Pemberian Televisi

Sehubungan dengan pembangunan stasiun relay televisi, tahun 1979 disebarkan 116 televisi umum. Kemudian tahun 1980 disebarkan 120 televisi umum dan sampai tahun 1985 terdapat 1.982 televisi umum. Dengan tersedianya fasilitas seperti ini, melalui stasiun televisi Jakarta, masyarakat Timor Timur dapat mengetahui sekaligus mengikuti perkembangan yang tidak hanya terbatas pada peristiwa-peristiwa nasional, melainkan juga pada peristiwa-peristiwa internasional. Melalui media elektronika ini terbuka tabir keterasingan mereka mengenai informasi.

b. Media Cetak

Pelayanan penerangan melalui media cetak juga mendapat perhatian pemerintah. Yaitu dengan menerbitkan sejumlah brosur, buletin dan surat kabar. Dengan meningkatnya kemampuan membaca dan menulis, sarana penerangan melalui media cetak akan semakin berperan, terutama pada generasi muda yang duduk di bangku sekolah. Melalui mereka, berita-berita dapat disalurkan kepada orang-orang tua yang masih buta huruf.

Tahun 1982/1983 mulai terbit sebuah Surat Kabar Mingguan "DILI POS" yang juga terpilih sebagai penerbitan pelaksanaan Koran Masuk Desa (KMD) Propinsi Timor Timur. Surat kabar ini karena terbitnya mengalami berbagai kesulitan teknis tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tahun 1985 telah terbentuk satu Yayasan bernama "TATOLI NAROMAN" dengan tujuan menerbitkan sebuah koran baru "SUARA TIMOR TIMUR" yang berfungsi sebagai KMD.

Untuk meningkatkan pelayanan penerangan terutama di daerah, dibangun Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas), masing-masing di Dili, Baucau, Ainaro, Maliana, Pante Makasar (Ambenu), Liquica, Gleno (Ermera) dan Suai. Secara bertahap direncanakan setiap kabu-paten memiliki sebuah Puspenmas. Lihat Tabel III-10.

This manganese sediment is generally in the form of ***pyrolusite mineral*** *and analysis of several samples showed an average content of 94.5% of MnO2.*

The amount of reserves is still unknown and requires further study.

b ***Talamata area, Baquia District (Baucau District)***

Sediment is found about one kilometer east of Baquia, at clay rock experiencing silification.

Formation process of this manganese sediment is not yet clear, but based on silification symptoms, it is most likely the result of submarine hot spring process.

Analysis from four samples showed an average content of 84% MnO2.

The amount of reserves in unknown.

c *Uaro Carabao area (Viqueque District)*

Though sedimentary association is still unknown, but observation results from Geological Maps of East Timor area by Audley Charles (1968) showed that presumably its formation process is almost similar to sediment in the Baquia area.

The potentials of the sediment is quite attractive, considering the result of counted denudation at the surface only reached about 1.000 metric tons.

In addition to the three areas mentioned, manganese sediments are also found in several locations, such as the area between Baucau—Venilale, around Haisoni (at the eastern slope of Mount Matobian) and other locations. There is no information, yet, on the potentials of sediment at those locations.

In utilizing manganese can be classified as follows: ***metallurgical, chemical*** *and* ***battery grade,*** *each according to attached qualification. The possibility of developing manganese sediment in East Timor can be carried out with due consideration to situation and marketing. Such as the case in supporting the battery industry (Surabaya, Jakarta and West Java), chemical industries and export possibilities. Basically, the mining of manganese (belongs to extrative material Group B) can be carried out thru the system of Mining by the People and by the National Private Sector, white its nature is* ***labor-intensive*** *and as an* ***cooperative*** *undertaking.*

Tabel / ***Table III — 10***

SARANA DAN PRASARANA PENERANGAN, 1977/1978 — 1985/1986
INFORMATION FACILITIES AND INFRASTRUCTURE, 1977/1978 — 1985/1986

Uraian / ***Description***	1977/78	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
Puspesmas / *Public Information Centre*	1 Buah	—	—	2 Buah	2 Buah	—	—	3 Buah	—
Stasiun RRI / *RRI radio station*	1 Sto	—	—	—	—	—	—	—	—
Pemancar TVRI / *TVRI relay station*	—	2 Lok	4 Lok	—	—	11 Lok	—	—	—
Percetakan / *Printing Outfit*	1 Buah	—	—	—	—	—	—	—	—
Televisi Umum / *Public TV*	—	116	120	340	—	—	1406	—	—
Muviani Darat / *Mobile Film Unit Land*	—	—	—	—	41 Buah	—	—	—	—
Mobil Unit Panggung / *Mobile Stage Unit*	—	—	—	—	1 Unit	—	—	—	—

Sumber : Biro Perencanaan, Departemen Penerangan, RI
Source : Planning Bureau, Department of Information

c. Radio Republik Indonesia

Dalam tahun 1981 di kota Dili dibangun stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) yang mempunyai daya pancar 1 Kwh. Setiap hari RRI Dili mengudara 24 jam dan menjangkau seluruh wilayah. Melalui media ini, disiarkan berita-berita yng dapat memperluas wawasan pengetahuan masyarakat. Misalnya program-program pemerintah untuk membangun Timor Timur, siaran keagamaan, siaran pedesaan, siaran untuk wanita, mengenal daerah-daerah di Indonesia, ilmu pengetahuan dan siaran hiburan, berupa nyanyian-nyanyian dari daerah. Sebagian besar siaran-siaran tersebut mempergunakan bahasa Indonesia. Namun pada jam-jam tertentu, siaran mempergunakan bahasa daerah (Tetun).

Disamping itu, dalam tahun 1982 telah disebarkan sebanyak 5.000 radio cassette kepada para kepala sekolah, dan kepala serta sekretaris desa di seluruh propinsi.

Pertambangan

Dari hasil-hasil penelitian dan eksplorasi baik oleh Allied Mining Corporation Pty Ltd. (1937), Japan Development Consultant Icc, (1974) maupun oleh Direktorat Sumber Daya Mineral (1984, 1985), Proyek Pengembangan Pertambangan dan Energi Wilayah III - Ujung Pandang - khususnya oleh Bagian Proyek Pertambangan dan Energi Wilayah

The mining itself does not require high technology and hand sorting is good enough.

2. *Gold, Silver and Copper*

The three minerals mentioned above are usually found together in the form of primary sediment, the reason why in this short description they are put in one group.

Sediments of gold, silver and copper in the East Timor area can be found in Table III — II

The policy of the East Timor Government in these mining activities is to conduct again a study and make a new inventory of extractive/mining material.

Electricity

Along with the fast growing community services, the supply of electricity is also on the increase. In 1985/1986, the medium-current network reached 66.019 Km and the low-current network 124.155 Km, distributed over all districts with an installed capacity of 9.000 km, serving 6.175 customers.

Diesel generated electricity plants built during the development period have brought light to the following districts and sub-districts: Liquica District, 20 June 1983; Maubara Sub-district, 15 June 1983; Ermera/Gleno District,

Timor Timur (1984, 1985) serta hasil informasi lainnya; diperoleh hasil sementara tentang Potensi Sumber Daya Mineral Daerah Timor Timur **ini,**

Potensi Sumber Daya Mineral tersebut adalah :

1. Endapan Mangan (Mn).

Endapan Mangan di Timor Timur ini dapat dijumpai, antara lain di :

a. **Daerah Vammassa (Kab. Baucau) :**
   Endapan berasosiasi dengan batu lempung Formasi Bobonaro, berupa sisipan-sisipan pada bidang perlapisan dari serpih berwarna **merah** yang mengalami distorsi akibat pengaruh gaya tektonik. Disamping itu dijumpai pula dalam bentuk nodul-nodul serta lensa-lensa tipis.
   Endapan Mangan ini umumnya berupa **mineral pirolusit** dan dari hasil analisa beberapa contoh yang diambil kadar rata-ratanya 94,5% MnO_2.
   Tentang jumlah cadangannya belum dapat diketahui dan masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
b. **Daerah Talamata, Kec. Baquia (Kab. Baucau) :**
   Endapan dijumpai ± 1 km sebelah Timur Baguis, terdapat pada batuan serpih yang mengalami silisifikasi.
   Proses pembentukan endapan mangan ini belum diketahui jelas akan tetapi berdasarkan gejala silisifikasi maka kemungkinannya merupakan hasil proses "Submarine hot-spring" (endapan air panas permukaan laut).
   Dari hasil analisa 4 buah contoh yang diambil diperoleh kadar rata-rata 84% MnO_2. Jumlah cadangan belum dapat diketahui.
c. **Daerah Uato Carabau, (Kab. Viqueque) :**
   Meskipun asosiasi endapan belum diketahui, akan tetapi dari hasil pengamantan Peta Geologi Daerah Timor Timur oleh Audley Charles (1968), diduga proses pembentukkannya hampir sama dengan endapan di Daerah Baquia.
   Potensi endapan cukup menarik, mengingat hasil perhitungan jumlah rombakan diatas permukaan saja mencapai sekitar 1.000 matrik-tone.

Selain di ketiga daerah tersebut masih dijumpai pula adanya Endapan mangan ini di beberapa lokasi, seperti daerah antara Baucau - Vanilala, di sekitar Haisoni (di lereng Timur Peg. Matabian) yang lokasi-lokasi lainnya. Informasi tentang potensi endapan di lokasi-lokasi tersebut belum ada/tersedia. Dalam pemanfaatan mangan dapat dikelompokkan atasi **metalurgical, chammical,** dan **battery grada,** adapun persyaratan masing-masing terlampir.

Adapun kemungkinan pengembangan endapan mangan di Timor Timur ini dapat dilaksanakan dengan pertimbangan situasi dan pemasarannya. Seperti untuk menunjang industri batu battery (Surabaya, Jakarta dan Jawa Barat), industri kimia dan kemungkinan untuk ekspor.

Pada dasarnya usaha pertambangan mangan (termasuk bahan galian golongan B) dapat dilaksanakan dengan sistem Pertambangan Rakyat dan Swasta Nasional serta dapat bersifat **padat karya** maupun usaha **koperasi.**

Pelaksanaan penambangan tidak terlalu memerlukan teknologi tinggi dan cukup dengan "hand sorting".

2. Emas, Perak dan Tembaga.

Ketiga jenis bahan galian ini secara umum biasanya dijumpai bersama-sama dalam bentuk endapan primmer, sebab itu dalam uraian singkat ini dikelompokkan jadi satu. Endapan emas, perak dan tembaga di daerah Timor Timur. Lihat Tabel III-11.

Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Timor Timur dalam mengusahakan kegiatan-kegiatan tersebut, adalah melakukan penelitian kembali dan menginventarisir bahan galian/pertambangan yang ada.

Kelistrikan

Seiring dengan pesatnya pelayanan kepada masyarakat, pemakaian di bidang kelistrikan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1985/86 panjang jaringan tegangan menengah mencapai 55.019 km dan jaringan tegangan rendah 124.155 km tersebar di seluruh kabupaten, dengan kapasitas terpasang 9.100 km meliputi 6.175 pelanggan.

Pembangkit listrik Tenaga Diesel yang dibangun selama masa pembangunan telah menerangi berbagai kabupaten dan kecamatan meliputi: Kabupaten Liquica, 20 Juni 1983; Kecamatan Naubara, 15 Juni 1983; Kabupaten Ermera/Gleno, 11 Oktober 1983; Kabupaten Covalima/Suai, 2 Oktober 1983; Kabupaten Manatuto, 5 Agustus 1983; Kabupaten Aileu, 20 Agustus 1983; Kabupaten Bobonaro/Maliana, 19 Maret 1984; Kabupaten Ambenu/Oecussi, 15 April 1984; Kabupaten Baucau, 29 Februari 1984; Kabupaten Same, 8 September 1984; Kabupaten Ainaro, 30 Agustus 1984; Kabupaten Lautem, 1 Agustus 1984; Kabu-

11 October 1983; Covalina/Suai District, 2 October 1983; Manatuto District, 5 August 1983; Aileu District, 20 August 1983; Bobonaro/Maliana District, 19 March 1984; Ambenu/Cecussi District, 15 April 1984; Baucau District, 29 February 1984; Same District, 8 September 1984; Ainaro District, 30 August 1984; Lautem District, 1 August 1984; Viqueque District, 7 August 1984; Railako District, 17 July 1985; Hera Sub-district, 2 August 1985; Metinaro Sub-district, 1 August 1985; Maubisse Sub-district, 17 August 1985; Ossu Sub-district, 11 September 1985; and Balibo Sub-district, 4 January 1986. Soon to follow will be the Sub-distric of Vemase, Venilale, Baugia, Laga, Watularo, Bobonaro and Atsabe.

Trade

Export commodities from East Timor consist of coffee, sandalwood oil, Sandalwood and olyster (clams). While imported commodities into East Timor are generally consumption goods, and from inter-island trade to East Timor consisting of rice, wheat flour, sugar, crisp chips, soap, tea, cigarets, tectile, garments, shoes, building material, stationaries, motor verhicles, etc.

Inter-island trade from East Timor consists of agricultural produce such as coffee, copra, candlenut, cowhide, sandalwood oil, saldalwood powder, saldalwood, cocoa, tamarind, clamshell and small green peas.

Companies active in trade must be in possession of trade Licenses (SIUP) in East Timor Province and in 1986, the number of those companies was 1.382 consisting of 8% whosalers, 36% middle class traders and 58% retailers.

In general, the location of those trading companies is in Dili (79%) and the rest scattered in all Districts.

Looking at the structure of business activities in East Timor, 68% are private business, 21% C.V. (limited partnership), 8% PT (limited companies), 2% Cooperatives and 1% Firma (firm).

Of the trade companies, some 34% are active in kiosks, 26% in shops, 18% in contractor's service, 12% in other service and 11% in inter island trade or as distributions.

Tabel *Table III — 11*

No.	Jenis Bahan galian *Type of mineral*	Lokasi/*Location*
1.	Minyak dan Gas Bumi *Crude oil and Gas*	- aliran S. Gakesar, Laleia Complek, G. Laulin Complek & Buaco Complek.
2.	E m a s/G o l d	- S. Liu, Laclo dosos Ekema (Same).
3.	M a n g a a n/ *Manganese*	- Vemassa, Fetumaca Desima & Loi Nelo.
4.	M a r m e r/*Marble*	- Manatuto

Trade facilities are limited to shops in Dili, and markets having the shape of large hall, scattered in nine Districts as well as warehousing.

There are some 3.300 square meters of warehouse at Dili harbour, the combined amount of warehouses at Line I and Line II, in addition to 9.636 square owned by business people.

The development of inter-island trade, export and import volume can be seen in Tables III 12, III — 13 and III — 14

The role of East Timor's products which are shipped inter-island and exported is still dominated by several commodities, such as coffee, copra, candlenut and sandalwood.

Coffee export each year reached an average of 3;630.26 tons or 94% of the total export volume. The lowest export level was reached in 1979 at 2,510 tons and the highest in 1980 at 5,597 tons.

The import of goods into East Timor such as foodstuff, drinks, garments, sugar cane, wheat flour, cement and electronic items. In 1980, the import volume was 3,401 tons, increasing annually by an average of 72.48% to reach 36,238 tons in 1985.

In order to support a smooth running of the economy, several general government and development banks have been opened, such as the ***Bank Pembangunan Daerah (BPD, Bank for Regional Development),*** *branches of the* ***Bank Dagang Negara (BDN)*** *and the* ***Bank Rakyat Indonesia (BRI),*** *and since July 1985, the* ***Bank Indonesia.*** *The Bank Pembangunan Daerah has opened an office in Baucau in the near future, three more branches will be opened in East Timor.*

Manpower

Condition of the East Timor community when linked with the need for skilled manpower to carry out development, is a major problem that should be solved.

The Regional Givernment has taken various efforts to solve the above problem, among others: to involve the community (generally those without skill) in labor-intensive projects like building village roads, simple irrigation,

paten Viqueque, 7 Agustus 1984; Kecamatan Railako, 17 Juli 1985; Kecamatan Hera, 2 Agustus 1985; Kecamatan Metinaro, 1 Agustus 1985, Kecamatan Maubisse, 17 Agustus 1985; Kecamatan Ossu, 11 September 1985; dan Kecamatan Balibo, 4 Januari 1986. Sedangkan kecamatan Vemase, Venilale, Baugia, Laga, Watularo, Bobonaro dan Atsabe, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera menyala.

Perdagangan

Potensi perekonomian daerah Timor Timur sebagian besar bersumber di sektor pertanian. Seperti : produksi tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk menciptakan sistem perdagangan yang dinamis, diadakan inventarisasi potensi di tiap kabupaten, dengan maksud agar dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sensus tahun 1980 menunjukkan sebanyak 109.190 rumah tangga di Timor Timur memperoleh sumber pendapatan utama dari produksi pertanian. Sisanya berpenghasilan dari sumber lain seperti : perdagangan (866 rumah tangga), industri kerajinan (627 rumah tangga), peternakan (645 rumah tangga), dan perikanan (502 rumah tangga).

Masalah utama di sektor ini, adalah rendahnya pendapatan ratarata anggota masyarakat. Produk kebanyakan anggota masyarakat hanya cukup memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam upaya mengatur sistem perdagangan, pemerintah melalui Departemen Perdagangan menetapkan peraturan tentang pemberian izin untuk membuka usaha. Karena itu, setiap lembaga yang bergerak di bidang umum dan jasa diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pada awal berlakunya peraturan tahun 1979, dikeluarkan 25 SIUP kepada para pengusaha dan sampai dengan Maret 1986, pengusaha yang memiliki izin usaha meningkat menjadi 1.256. Potensi rakyat Timor Timur untuk terjun ke dunia usaha nampak cukup besar. Perkembangan sejak tahun 1979 sampai dengan 1985 menunjukkan kenaikan rata-rata 119,5% per tahun.

Pemerintah juga memperhatikan peranan pengusaha ekonomi lemah yang merupakan golongan mayoritas dalam menunjang pembangunan perekonomian Timor Timur. Sejak tahun 1980/81 kepada mereka diberikan bekal berupa latihan-latihan ketrampilan dan penataran-penataran praktis serta konsultasi, yang dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia, Jakarta, serta instansi lainnya. Tujuannya meningkatkan kemampuan mereka di bidang manajemen sederhana, keuangan dan masalah dunia usaha lainnya. Tahun 1985/1986, kegiatan diikuti 625 peserta, termasuk di dalamnya wanita, pedagang dan pengusaha muda.

Selain penataran, diadakan penyuluhan-penyuluhan kepada pedagang ekonomi lemah, yang dimulai tahun 1982/1983 di Dili dan Maliana (Bobonaro). Dengan peserta 90 orang. Penyuluhan ini diarahkan pada masalah yang bersifat praktis dan mudah dimengerti para peserta. Selain usaha-usaha meningkatkan ketrampilan pedagang, dibangun pula pasar percontohan di Kabupaten Baucau dan direncanakan terus dibangun di daerah lainnya.

Untuk mengatasi tingginya harga dan tersedianya kebutuhan masyarakat, dilaksanakan perdagangan perintis yang dimulai tahun 1976, dan dilaksanakan Persero Niaga (PT Kerta Niaga) bekerja sama antara Departmen Perdagangan dan Departemen Perhubungan.

Perdangan perintis ini mendapat fasilitas kapal laut khusus membawa barang dari Surabaya dan Ujungpandang yang ditangani oleh Persero Negara secara periodik. Keuntungan dari perdagangan perintis ini harga dapat lebih murah karena ongkos angkutan laut mendapat keringanan (subsidi) terhadap barang-barang yang berasal dari produsen atau tangan pertama.

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Timor Timur meningkat. Kebutuhan barang-barang tersebut, merupakan salah satu indikator bahwa daya beli rakyat di daerah ini semakin meningkat dan hal ini berkorelasi positif dengan meningkatnya pendapatan mereka.

Arus kunjungan kapal laut ke pelabuhan Dili setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Apabila tahun 1984 berjumlah 166 kapal, tahun 1985 menjadi 269 kapal dengan frekuensi rata-rata per bulannya 22 kapal. Tahun 1985 sebanyak 196.221 ton/m³ barang-barang yang diturunkan (bongkar) dan 10.102 ton/m³ barang yang dimuat, suatu kenaikan masing-masing sebesar 72% dan 14% bila dibanding tahun sebelumnya.

Hasil Timor Timur yang diantarpulaukan dan diekspor berjumlah 17 komoditi dan peranannya masih didominasi oleh beberapa komoditi seperti kopi, kopra, kemiri dan cendana.

Peranan ekspor kopi setiap tahun rata-rata mencapai 3.630,26 ton atau 94% dari total volume ekspor. Ekspor terendah sebesar 2.510 ton terjadi pada tahun 1979 dan tertinggi sebesar 5.597 ton pada tahun 1980.

Impor Timor Timur berupa barang makanan, minuman, pakaian jadi, gula pasir, tepung terigu, semen dan barang-barang elektronik.

drinking water facilities, and so forth. In doing so, employment opportunities can be created, especially for those with few skills. It is then expected that the unemployed laborers and farmers can be utilized in labor-intensive projects. Those involved will then have additional income and will have a positive impact on their economy.

In overcoming this manpower problem, a New-Style Labour-Intensive Project (PKGB) has been introduced, aimed at solving the problem of manpower shortage. This project is carried out in all sub-districts where population density in high and people are poor, both in the rural as well as urban areas, with the main priority to areas prona to natural disasters, in addition to areas where the economy is on the decline. Presently, there is much evidence of this intensive-labor project such as the construction of village road in Baucau, Lospalos and the simple irrigation system built in Lautem District. Other efforts are courses in certain skills through a Mobile Training Unit Improvement project. The skills included typing, sewing, carpentry, metal working, radio mechanic and masonry. Duration of the course is from two to three moths. Graduate are presented with a package of equipment which can be a starting capital, and it was hoped that they will start a business in their res ective fields. Such as starting a radio repair shop, tailoring and other activities.

In 1979/1980, 32 persons were trained in carpentry, and this figure increased to 100 in 1985/1986. In construction there were 32 persons, increasing to 100 in 1985/86. Table III — 15 will illustrate the number of manpower trained through the Mobile Training Unit.

Based on the field of employment is this territory, the agricultural sector is absorbing the major part or 89.90% of the manpower, small industries 0.75%, trade 0.79%, animal husbandry 0.59%, fishery 0.45% and the other sectors 5.24%.

Cooperatives

The role of cooperatives is a supporting element in the economy of East Timor, particularly if linked with the people's standard of living. That is why since the very beginning, cooperatives have been introduced to the people in this territory through extension programs from the district to the sub-district level.

Cooperative activities in East Timor are directed at (a) credit provision, (2) the increase and marketing of people's produce and (3) the distribution of basic commodities for daily needs, especially the nine basic commodities like rice, sugar, salt, salted fish, cooking oil, kerosene, flour, soap and textile.

There was a total of 134 cooperatives in this territory, including 64 Village Unit Cooperatives (KUD), 63 Servant Cooperatives ABRI and two women-run cooperatives. Up to 1985, members of the cooperatives reached 28.996. The Government, through the Regional Office of Cooperatives, assists each KUD with a pick-up.

In 1980 there were only 34 cooperatives, in 1983 increased to 118 and in 1984 reached 123. While in 1980, there were 2.380 cooperative members, in 1983 becoming 24.419 and increased in 1984 to 25.181 members. (See Table III — 16)

The increase in number of members is an indication of growing awareness among the East Timorese about the role of cooperatives/KUD. In addition to the increasing number of membership, cooperatives savings show an encouraging increase. Savings of members by the end of 1985 totalled Rp193.220.000,-

Social Services

The program of guiding and social extension to the community in East Timor is aimed at stimulating awareness and the will to solve social problems, whether individually or in groups. These activities of providing information have succeeded in improving the desire for mutual cooperation and creating a feeling of togetherness, discipline and social responsibility toward attaining autoactivity and self-support in the community.

Besides rehabilitation and providing care through the system of non-instituation to 285 disabled persons and care for 175 persons in institutions, in general, assistance is sent to training institutions for the disabled, such as Prof Dr Soeharso's Rehabilitation Centre for the Disable (PRPCT) in Surakarta (Central Java) and the PRPCT in Ujung Pandang (South Sulawesi), where medical attention is given like repairing and fitting of prostheses. These prostheses will help the disabled to support themselves, for instance by opening a tailor's shop, shoe-repair shop and so on.

The assistance and care of neglected children in East Timor Province are conducted institutions and non-institutions. The objective is to create self-confidence so that gradually they become independent. Assistance and care for neglected children through institutions between 1981 and 1985 were extended to 390 children, while 150 children are entrusted to the Anak Bambu Apus Home in Jakarta and 240 others at the Sasana Serba Guna Bemori Home in Dili.

Pada tahun 1980, volume impor sebesar 3.401 ton, terus meningkat setiap tahunnya rata-rata 72,48% sehingga pada tahun 1985 mencapai 36.238 ton.

Untuk mendukung lancarnya roda perekonomian, dibuka beberapa bank Umum Pemerintah dan bank Pembangunan seperti Bank Pembangunan Daerah, Kantor Cabang Bank Dagang Negara dan Bank Rakyat Indonesia. Sejak Juli 1985, dibuka Bank Indonesia. Bank Pembangunan Daerah juga membuka kantornya di Baucau, dan dalam waktu dekat dibuka di tiga kabupaten lainnya di Timor Timur.

Barang-barang yang diekspor dari Timor Timur meliputi Kopi, Minyak Cendana, Serbuk Cendana, Kayu Cendana dan Kerang. Sedangkan barang-barang yang diimpor ke Timor Timur pada umumnya adalah barang-barang konsumsi, adapun pemasukan barang antar pulau ke Timor Timur adalah beras, tepung terigu, gula, kerupuk, sabun, teh, rokok, tekstil, pakaian jadi, sepatu, bahan bangunan, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
Perdagangan antar pulau dari Timor Timur meliputi hasil hasil pertanian antara lain kopi, kopra, kemiri, kulit sapi, minyak cendana, serbuk cendana, kayu cendana, coklat, asam, kulit kerang, dan kacang hijau.

Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan telah memiliki Izin Usaha Perdagangan di Propinsi Timor Timur pada tahun 1986 berjumlah 1.382 perusahaan yang terdiri dari 8% pedagang besar, 34% pedagang menengah, dan 58% pedagang kecil.

Lokasi dari perusahaan dagang pada umumnya berkedudukan di Dili (sebesar 79%) dan sisanya tersebar di seluruh Kabupaten.

Bentuk usaha dari perusahaan di Timor Timur merupakan perusahaan perorangan sebanyak 68%, berbentuk CV sebanyak 21%, P.T. sebanyak 8%, Koperasi 2%, dan Firma 1%.

Perusahaan Dagang yang bergerak di bidang usaha perkiosan sebanyak 34%, pertokoan 26%, jasa kontraktor 18%. Jasa lainnya 12% dan pedagang antar pulau atau penyalur sebanyak 11%.

Sarana perdagangan masih terbatas kepada toko-toko di Dili dan pasar yang berbentuk los tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten serta pergudangan.
Pergudangan di Pelabuhan Dili luasnya 3.300 m² yang merupakan penjumlahan dari 4 gudang di Lini I dan Lini II, disamping itu terdapat 9.636 m² yang merupakan milik 47 pedagang.

Perkembangan perdagangan antar pulau, volume ekspor dan impor dapat diikuti pada tabel berikut :
Lihat Tabel II-12, II-13 dan II-14.

Tenaga Kerja

Kondisi masyarakat Timor Timur dikaitkan dengan kebutuhan tenaga-tenaga trampil dalam melaksanakan pembangunan, merupakan masalah pokok yang harus ditanggulangi. Untuk itu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya.

Berbagai usaha dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain : mengikutsertakan masyarakat (umumnya tidak mempunyai keterampilan) dalam proyek-proyek padat karya seperti : pembangunan jalan desa, pengairan sederhana, pembangunan saluran air minum dan sebagainya. Melalui proyek ini diusahakan dapat tercipta kesempatan kerja, terutama bagi masyarakat yang mempunyai ketrampilan rendah. Dengan dibukanya kesempatan tersebut diharapkan para penganggur dan petani yang tidak bekerja dapat dimanfaatkan tenaganya dalam proyek yang menyerap tenaga kerja. Dengan demikian mereka-mereka yang terlibat mempunyai penghasilan tambahan dan berdampak positif terhadap keadaan sosial ekonominya.

Upaya mengatasi bidang ketenagakerjaan, adalah diadakan proyek Padat Karya Gaya Baru (PKGB) yang ditujukan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Proyek ini dilaksanakan di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah, terutama yang padat penduduk dan misk .. Baik di tingkat desa maupun perkotaan, dengan prioritas utama pelaksanaan di wilayah yang sering dilanda bencana alam. Disamping daerah-daerah yang kegiatan ekonominya cenderung menurun. Saat ini banyak hasil yang terlihat dari adanya proyek-proyek padat karya. Misalnya pembangunan jalan desa di Baucau, Lospalos dan pembangunan irigasi sederhana di Kabupaten Lautem. Usaha lainnya adalah mengadakan kursus-kursus ketrampilan tertentu melalui proyek peningkatan Mobile Training Unit. Kursus keterampilan ini meliputi kursus mengetik, menjahit, tukang kayu, pandai besi, montir radio dan tukang batu. Lama kursus sekitar 2 hingga 3 bulan. Setiap angkatan yang selesai kursus diberikan satu paket peralatan. Paket tersebut merupakan modal awal dan diharapkan dapat membuka suatu usaha tertentu sesuai bidangnya.

Misalnya untuk membuka bengke radio, penjahit dan kegiatan lainnya, disamping disalurkan bekerja di kantor-kantor yang membutuhkan.

Dalam tahun 1979/1980 jumlah tenaga yang dilatih di bidang pertukangan kayu 32 orang. Dalam tahun 1985/1986 meningkat men-

Tabel / *Table III — 12*

PERDAGANGAN ANTAR PULAU MENURUT MATA DAGANGAN YANG KELUAR DARI PROPINSI TIMOR TIMUR THN 1984 — 1986
INTER—ISLAND TRADE ACCORDING TO COMMODITY FROM EAST TIMOR PROVINCE, 1984 — 1986

No.	Mata Dagangan *Commodity*	1984	1985	1986
1.	Kopi/*Coffee*	4.083,06	1.925,39	5.442,[illegible]
2.	Kopra/*Copra*	46,80	273,29	168,2[illegible]
3.	Kemiri/*Candlenut*	443,80	257,22	461,2[illegible]
4.	Kulit Sapi *Cowhide*	11,70	18,00	9,0[illegible]
5.	Minyak Cendana *Sandalwood oil*	1	—	2,3[illegible]
6.	Serbuk Cendana *Sandalwood powder*	55	—	109,73
7.	kayu Cendana *Sandalwood*	—	50,00	—
8.	Asam/*Tamarind*	—	1,31	32,59
9.	Coklat/*Cocoa*	2,63	3,83	1,70
10.	Kulit Kerang/*Clamshell*	—	—	11
11.	Kacang Hijau *Small green peas*	48	—	—

Sumber : Kanwil Dep. Perdagangan Prop Timor Timur
Source : Regional Office, Department of Trade, East Timor Province

Tabel / *Table III — 13*

VOLUME EKSPOR MATA DAGANGAN PROPINSI TIMOR TIMUR TAHUN 1984 — 1985
COMMODITY EXPORT VOLUME OF EAST TIMOR PROVINCE, 1984—1985 (tons)

No.	Mata Dagangan *Commodity*	1984	1985	1986
1.	Kopi/*Coffee*	2.955	3.195,20	—
2.	Minyak Cendana *Sandalwood Oil*	—	—	—
3.	Serbuk Cendana *Sandalwood Powder*	70	35	—
4.	Kayu Cendana *Saldalwood*	40	21,34	—
5.	Kerang/*Clamshell*	—	2,85	—

Sumber : Kanwil Dep. Perdagangan Prop. Timor Timur.
Source : Regional Office, Department of Trade, East Timor Province

Tabel / *Table III — 14*

VOLUME IMPOR PROPINSI TIMOR TIMUR SELAMA TAHUN 1984 — 1985
IMPORT VOLUME OF EAST TIMOR PROVINCE, PERIOD 1984 — 1986

No	Bulan/*Month*	Tahun/*Year*		
		1984	1985	1986
1.	Januari/*January*	709,065	2.864,000	3.035,000
2.	Februari/*February*	1.255,270	—	2.950,000
3.	Maret/*March*	1.954,720	2.264,000	7.366,105
4.	April/*April*	1.452,886	2.560,000	3.000.000
5.	Mei/*May*	404,868	2.643,000	—
6.	Juni/*June*	1.392,446	6.075,000	3.000.000
7.	Juli/*July*	1.714,665	1.701,670	3.100.000
8.	Agustus/*August*	1.392,444	2.804,840	3.000.000
9.	September	—	3.800,000	—
10.	Oktober/*October*	1.415,769	2.806,000	2.988,000
11.	Nopember/*November*	2.200,000	5.859,840	10.250,000
12.	Desember/*December*	—	2.859,843	—
	Jumlah ***Total***	13.903,133	36.238,193	38.689,105

Sumber/Source : Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Stevedoring companies Pengusaha/Business people
Diolah Kanwil Depdag/Compiled by the Regional Office, Department of Trade.

jadi 100 orang. Di bidang bangunan 32 orang, dalam tahun 1985/1986 meningkat menjadi 100 orang. Untuk jelasnya mengenai uraian jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui Proyek Mobile Training Unit. Lihat Tabel III-15.

Berdasarkan lapangan kerja di wilayah ini, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak, yaitu 89,90%, Industri kecil 0,75%, perdagangan 0,79%, peternakan 0,59%, perikanan 0,45% dan sektor-sektor lainnya sebesar 5,24%.

Koperasi

Peranan koperasi merupakan elemen penunjang roda perekonomian di Timor Timur, terutama bila dihubungkan dengan tingkat kehidupan rakyat. Pengenalan koperasi kepada rakyat di wilayah ini sejak awal sudah dilaksanakan. Yaitu melalui program-program penyuluhan ditingkat kabupaten hingga kecamatan.

Kegiatan koperasi di Timor Timur diarahkan kepada (1) perkreditan, (2) peningkatan dan pemasaran produksi rakyat, dan (3) penyaluran bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Terutama 9 bahan kebutuhan pokok seperti : beras, gula, garam, ikan asin, minyak goreng, minyak tanah, tepung terigu, sabun cuci dan tekstil.

Jumlah koperasi di wilayah ini 134 buah, termasuk 64 Koperasi Unit Desa (KUD), 63 koperasi pegawai negeri/ABRI dan 2 koperasi wanita. Hingga tahun 1985 jumlah anggota yang tercatat 28.996 orang. Pemerintah melalui Kanwil Koperasi memberikan bantuan kepada setiap KUD sebuah mobil pick-up.

Peningkatan jumlah anggota koperasi merupakan gambaran semakin disadarinya peranan koperasi/KUD oleh masyarakat Timor Timur. Disamping adanya peningkatan jumlah anggota koperasi itu, dari segi simpanan koperasipun menunjukkan peningkatan menggembirakan. Simpanan anggota di akhir tahun 1985 berjumlah Rp 193.220.000,-

Seiring dengan kegiatan perkoperasian di Timor Timur dilaksanakan pula program penataran/pendidikan mengenai sistem administrasi koperasi. Program ini diberikan kepada para pimpinan, pengurus dan kader koperasi se propinsi dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola pekerjaan yang ditekuni.

Dalam tahun 1980 jumlah koperasi baru 34 buah, tahun 1983 meningkat 118 buah dan tahun 1984 meningkat menjadi 123 buah. Sedang jumlah anggota dalam tahun 1980 sebanyak 2.380 orang, tahun 1983 menjadi 24.419 orang, kemudian meningkat dalam tahun 1984 sebanyak 25.181 orang. Lihat Tabel III-16.

Generally, training is skills are given such as carpentry, masonry, radio, car, and motor mechanics, electronics, welding, sewing, agriculture, animal husbandry and so forth. As a result, some have become independent, opened a business, work in offices as weel as becoming civil servants.

Assistance and care through non-institutional system are given to 1.540 neglected children in the form of training is skills like carpentry, mesonry, agriculture, sewing and cooking. After completion of training, generally they receive an incentive package consisting of tools for carpentry, masonry, agriculture, sewing and kitchen/cooking utensils.

Regarding the poor, assistance and care are given in Ermera and Baucau Districts by training them skills in agriculture, animal husbandry, carpentry, masonry and shops. These families are now self-sufficient through the marketing of their economically productive skills. In addition to skill, they also receive working capital as a group and individually, in the form of equipment for carpentry, masonry, animal husbandry and shop keeping.

The emphasis of development in the industrial sector is still on processing of agricultural produce and the development of handicraft, such as plaiting, traditional weaving, ornaments and so forth. A start was made in 1982 to develop salt production by the natives, food/beverage industries, smithy and building material such as bricks and tiles.

The main problem faced since the start of developing this sector was the shortage of skilled labor and capital. In overcoming this problem, the following steps were taken: providing courses to improve skills in the fields of building/construction, carpentry, radio/electronics mechanics, ready-made clothes, smithy, weaving and so forth. To support the program, an industrial training centre was opened in Liquica, providing a program for training in industrial skills.

For enterpreneurs of the weak (puny) economic group who constitute a majority in this area, a 'Bimbingan Pengembangan Industri Kecil or ***BIPIK****' (a Body to Guide and Develop Small Industries) has been established. At present in under preparation a program for realising the growth of small industries which is beneficial and actually enjoyed by the public. The* ***BIPIK*** *program is directed at industries which support the agricultural sector, such as: agricultural equipment, fertilizer industry and processing agricultural produce.*

Through the BIPIK-program in 1983/1984, education and training were arranged for 80 persons originating from several districts like Aileu, Ainaro, Bobonaro, Liquisa and Manatuto.

Tabel / ***Table III — 15***

JUMLAH TENAGA KERJA YANG DILATIH MELALUI PROYEK MOBILE TRAINING UNIT

NUMBER OF MANPOWER TRAINED THROUGH THE MOBILE TRAINING UNIT

Kegiatan *Activity*	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86	Jumlah *Total*
Pertukangan Kayu *Carpentry*	32	48	64	80	80	100	100	504
Bangunan *Construction*	32	48	64	80	80	100	100	504
Pertukangan Besi *Blacksmith*	32	48	64	60	60	40	20	324
Elektronika *Electronics*	16	48	64	60	60	20	–	248
Instalasi Listrik *Installation of Electricity*	–	–	–	40	60	60	–	160
Pertukangan Las Listrik/*Electric Welding*	–	–	–	20	60	40	40	160
Pertukangan Pipa/Kaleng *Tin/Pipe Plumbing*	–	–	–	–	20	40	20	80
Perbengkelan Sepeda Motor/ *Motor cycle repairs*	–	–	–	20	80	40	40	220
Mengetik/*Typing*	32	32	64	40	20	40	120	348
Menjahit/*Sewing*	32	32	64	80	20	40	40	308
Pertanian/*Agriculture*	–	–	–	–	20	20	–	40
Peternakan/*Animal husbandry*	–	–	–	–	40	20	–	60
Perikanan/*Fishery*	–	–	–	–	–	40	–	40
Jumlah/*Total*	176	256	348	400	600	600	480	2.976

Sumber : *Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Propinsi Timor Timur*

Source : Regional Office, Department of Manpower, East Timor Province.

Tabel / *Table III — 16*

JUMLAH KOPERASI, ANGGOTA, SIMPANAN DAN VOLUME USAHA, 1980 — 1985

NUMBER OF COOPERATIVES, MEMBERS, SAVINGS AND VOLUME OF ACTIVITIES, 1980 — 1985

Uraian *Description*	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Jumlah Koperasi/ Koperasi Unit Desa *Number of Cooperatives/KUD*	34 buah	46 buah	105 buah	118 buah	123 buah	134 buah
Anggota (orang) *Members (persons)*	2.380 orang	12.386 orang	24.062 orang	24.419 orang	25.181 orang	28.996 orang
Simpanan Anggota (000Rp) *Savings of Members (in 000Rp)*	Rp •5.900,-	Rp 21.651,-	Rp 55.892,-	Rp 155.580,-	Rp 168.418,-	Rp 193.000,-
Volume Usaha Koperasi/ KUD *Volume of KUD activities*	Rp 44.236,-	Rp 601.846,-	Rp 2.463.185,	Rp 5.680.779,-	Rp 4.435.917,-	Rp 6.496.000,-

• *dalam ribuan rupiah*

Sumber : *Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Timor Timur.*

Source : Regional Office, Department of Cooperatives, East Timor Province

Pelayanan Sosial

Program bimbingan dan penyuluhan sosial masyarakat di Timor Timur ditujukan untuk menimbulkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial. Baik secara pribadi maupun secara kelompok. Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan kegairahan bekerja secara gotong royong dan menimbulkan rasa kebersamaan, disiplin dan tanggung jawab sosial menuju tercapainya, swakarya dan swasembada masyarakat.

Disamping merehabilitasi dan memberi pelayanan dengan sistem non panti kepada 285 orang penyandang cacat dan penyantunan 175 orang dalam panti. Umumnya yang disantun dikirim ke panti-panti latihan penderita cacat tubuh seperti di Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh Prof Dr Soeharso, di Pusat Rehabilitasi penyandang Cacat Tubuh (PRPCT) di Ujung Pandang. Selain itu diberikan pelayanan medis, seperti perbaikan dan pemasangan prothese. Dengan adanya pemasangan prothese, para penyandang cacat diharapkan dapat berusaha membiayai hidup sendiri. Dengan usaha seperti membuka usaha jahit-menjahit, usaha sol sepatu dan lain sebagainya.

Penyantunan dan pengentasan anak terlantar di propinsi Timor Timur, dilaksanakan melalui lembaga panti dan non panti. Tujuannya menumbuhkan rasa percaya diri, sehingga lambat laut mereka dapat mandiri. Penyantunan dan pengentasan anak terlantar melalui Panti dilaksanakan tahun 1981 hingga tahun 1985 dengan jumlah 390 anak. Sedang sebanyak 150 anak disantun di Panti Penyantunan Anak Bambu Apus Jakarta dan 240 anak disantun di "Sasana Serba Guna" Bemori, Dili.

Mereka umumnya diberikan latihan ketrampilan pertukangan kayu, pertukangan batu, montir radio, mobil, motor, elektronik, las, jahit-menjahit, pertanian, peternakan dan lain-lain. Hasil pelaksanaan penyantunan, sebagian dari mereka mampu mandiri, berwiraswasta dan menjadi karyawan perusahaan maupun pegawai negeri.

Penyantunan dan pengentasan 1.540 anak terlantar sistem non panti dilaksanakan dengan memberikan berbagai latihan ketrampilan seperti : pertukangan kayu, tukang batu, pertanian, jahit-menjahit dan masak-memasak. Umumnya setelah mereka mendapat ketrampilan, memperoleh paket stimulans. Seperti : peralatan tukang kayu, pertukangan batu, pertanian, jahit-menjahit dan peralatan masak-memasak.

Bantuan dan pengentasan untuk fakir miskin dilaksanakan di kabupaten Ermera dan Baucau dengan memberikan latihan ketrampilan di bidang pertanian, peternakan, pertukangan kayu dan batu serta bidang perkiosan. Para keluarga itu kini telah mampu mandiri melalui pemasaran hasil-hasil ketrampilan bidang ekonomis produktif. Selain memperoleh latihan ketrampilan, diberikan pula modal kerja kelompok dan perorangan. Seperti peralatan tukang kayu, peralatan tukang batu, peralatan/paket ternak dan perkiosan.

Industri

Perkembangan sektor industri di Timor Timur masih dititikberatkan kepada usaha pengolahan hasil pertanian dan pengembangan barang kerajinan rakyat Terutama seperti anyam-anyaman, tenun tradisional, barang perhiasan dan lain sebagainya. Sejak tahun 1982 dikembangkan industri garam rakyat, industri bahan makanan/minuman, pandai besi dan bahan bangunan, seperti batu bata dan ubin.

Masalah mendasar yang dihadapi di awal upaya pengembangan sektor ini adalah kurangnya tenaga trampil dan modal. Untuk me-

In 1985/1986, there were 1.215 businesses active in the industrial sector with a total investment of Rp1.972.214.000,-, absorbing a labor force of 4.826 persons. Furthermore, since 1983, credit totalling Rp117.614.000,- was channeled to 11 enterpreneurs is small industries.

The food processing industry totalled 133 in 1981/1982, increasing to 465 in 1985/1986. While the metal industry totalled 59 in 1981/1982 and became 111 in 1985/1986.

Table illustrates the industrial situation and manpower between 1981 and 1985.

Religion

Since East Timor's integration with the Republic of Indonesia, there has been increased guidance in religious life. In the first phase, rehabilitation took place of Catholic houses of worship which were damaged during the revolution. Followed by the construction of houses of worship for Catholics, Protestants, Moslems, Hindus and Buddhists. In 1984 a start was made with designs of the Dili Cathedral and presently under construction.

The government also gives allowance to spiritual leaders. Thousands of holy books such as the Bible and the Quran have been distributed.

Religious guidance is East Timor is also through the mass media, like the radio and distribution of brochures through educational channels, from primary school level up to senior high school (SD to SLTA). Those interested in the religious (Catholic) sector are given scholarships to study at seminaries in Ende (Flores, island, East Nusa Tenggara), Malang (East Java) and Yogyakarta (Central Java).

According to records, in 1985 there were in East timor 474.135 Catholics, 21.443 Protestants, 11.883 Moslems, 3.275 Hindus, 14.258 Buddhists and about 86.553 followers of local beliefs.

Economic Growth

Regional economic growth of East Timor Province till the end of Pelita III (in 1983) on the basis of increase in Gross Domestic Regional Product (PDRB), based on the 1981 constant was 9.6% (1981—1983). Compared with the situation in the first year of Pelita IV which was 11.08%, it means an increase of 1.48% from 1981—1983. That growth is still higher than the average growth rate of National Pelita III which stood at 7%.

While the estimate of East Timor's regional economic growth in Pelita IV is an average of 6.8% annually.

In Pelita III, the agricultural sector still showed sufficient high growth, an average of 7.9%. Compared with the situation between 1981—1984, namely entering the first year of Pelita IV, the agricultural sector still showed a growth around 8.4%, meaning that from the end of Pelita III and entering the first year of Pelita IV, this sector still showed a sufficient increase.

Second place in determining PDRB was the Public Administration Sector with 21.32% in 1984. The average from 1981—1984 was 18.47%. Next came the construction sector with 7.51%, communications 4.59%, and trade 3.03%. Then successively the other sectors like banking 2.45%, house rent 2.06%, industry 1.18%, mining 0.46% and services 0.62%.

nanggulangi masalah ini diambil langkah sebagai berikut; memberikan latihan ketrampilan dalam bidang bangunan/konstruksi, pertukangan, montir radio/elektronika, konveksi, pandai besi, pertenunan dan lain-lain. Untuk mendukung program dibangun pusat latihan industri di Liquisa, yang melayani program latihan ketrampilan industri.

Untuk pengusaha golongan ekonomi lemah yang menjadi mayoritas di daerah ini, dibentuk Bimbingan Pengembangan Industri Kecil (BIPIK). Dewasa ini sedang disusun program bagi terwujudnya pertumbuhan industri kecil yang manfaatnya dapat dirasakan. Program BIPIK diarahkan kepada industri yang menunjang sektor pertanian. Seperti; alat-alat pertanian, industri pupuk dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian.

Dalam tahun 1983/1984 melalui program BIPIK dilaksanakan pendidikan dan latihan kepada 80 orang. Berasal dari berbagai kabupaten seperti kabupaten Aileu, Ainaro, Bobonaro, Liquisa dan Manatuto.

Dalam tahun 1985/1986 usaha yang bergerak di sektor perindustrian di wilayah ini 1.215 buah, dengan nilai investasi Rp 1.972.214.000,- dan mampu menyerap 4.828 tenaga kerja. Disamping itu, sejak tahun 1983 disalurkan kredit kepada 11 pengusaha industri kecil dan dana sebesar Rp117.614.000,-

Dalam tahun 1981/1982 industri pengolahan pangan mencapai 133 buah. Tahun 1985/1986 meningkat menjadi 465 buah. Sedang industri logam dalam tahun yang sama 59 buah, meningkat dalam tahun 1985/1986 jadi 111 buah.

A g a m a

Sejak bersatunya Timor Timur kepangkuan Republik, kegiatan pembinaan kehidupan beragama terus ditingkatkan. Dalam tahap pertama direhabilitasi rumah peribadatan Katholik yang dalam masa pergolakan mengalami kerusakan. Kemudian dilaksanakan pembangunan tempat-tempat peribadatan. Baik untuk umat Katholik, Protestan, Islam maupun Hindu. Dalam tahun 1984 didisain pembangunan Katedral di Dili dan sekarang dalam proses penyelesaian.

Pemerintah juga memberikan tunjangan kepada para rohaniawan maupun rohaniwati. Disebarkan pula ribuan kitab-kitab suci seperti; Bibel dan Al-Qur'an.

Pembinaan keagamaan di Timor Timur juga dilakukan mass media seperti melalui radio, dan penyebaran brosur-brosur juga dilakukan melalui jalur pendidikan tingkat SD hingga SLTA. Kepada mereka yang tertarik kepada bidang keagamaan (Katholik) diberi bea siswa dan dikirim ke Seminari di Ende (Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur), Malang (Jawa Timur dan Yogyakarta).

Menurut catatan, hingga tahun 1985 umat beragama di Timor Timur terdiri dari 474.135 Katholik, 21.443 Protestan, 11.883 Islam, 3.273 Hindu, 14.258 Budha dan sekitar 86.553 menganut kepercayaan lokal.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional propinsi Timor Timur hingga akhir Pelita III (dalam tahun 1983) berdasarkan kenaikan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar konstan tahun 1981 sebesar 9,6% (tahun 1981 - 1983). Dibandingkan dengan keadaan tahun pertama Pelita IV sebesar 11,08%, berarti terjadi kenaikan 1,48% dari tahun 1981-1983. Pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata Nasional Pelita III yang sebesar 7%.

Sedang perkiraan pertumbuhan ekonomi regional Timor Timur dalam Pelita IV rata-rata diharapkan 6,8% per tahun.

Sektor pertanian dalam Pelita III masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,9%. Dibandingkan dengan keadaan antara tahun 1981-1984 yaitu memasuki Pelita IV tahun pertama, sektor pertanian masih menunjukkan pertumbuhan sekitar 8,4%. Berarti dari Pelita III dan memasuki tahun pertama Pelita IV sektor ini masih menunjukkan kenaikan cukup berarti.

Sektor yang menduduki urutan kedua dalam pembentukan PDRB ialah sektor Pemerintahan yaitu sebesar 21,32% di tahun 1984. Secara rata-rata dari tahun 1981-1984 sebesar 18,47%. Menyusul sektor konstruksi sebesar 7,51%, sektor perhubungan sebesar 4,59% dan sektor perdagangan sebesar 3,03%. Kemudian berturut-turut sektor lain seperti sektor perbankan 2,45%, sektor sewa rumah 2,06%, sektor industri 1,18%, sektor pertambangan 0,46% dan sektor jasa-jasa sebesar 0,62%.

Tabel / ***Table III — 17***

KONDISI INDUSTRI DI PROPINSI TIMOR TIMUR
TAHUN 1981/82 — 1985/86

INDUSTRIAL SITUATION IN EAST TIMOR PROVINCE, PERIOD 1981/1982 — 1985/1986

Cabang Industri / *Branch of Industry*	Unit Usaha/*Units* 1981/82	1982/83	1983/84	1984/85		Tenaga Kerja/*Manpower* 1981/82	1982/83	1983/84	1984/85	1985/86
Pengolahan pangan / *Food processing*	133	133	149	187	465	449	449	490	628	1.914
Sandang dan Kulit / *Clothing and leather*	19	19	21	26	293	40	40	63	80	957
Kimia dan Bahan Bangunan/*Chemicals and Building Materials*	323	453	453	453	757	56	56	63	77	118
Kerajinan Umum / *Handicrafts*	781	781	874	1.113	764	317	317	356	447	228
L o g a m / *Metals*	293	293	300	360	434	59	59	65	81	111
Jumlah ***Total***	584	584	654	818	1.215	1.886	1.886	2.180	2.634	4.828

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perindustrian, Propinsi Timor Timur
Source : Regional Office, Department of Industries, East Timor Province.

B A B / *CHAPTER IV*

LIPUTAN DI PROPINSI TIMOR TIMUR

PROVINCE A GLANCE AT EAST TIMOR

DARI ketinggian jelajah sekitar 15.000 kaki (± 5.300 meter) dari pesawat Garuda F-28, terlihat sejauh mata memandang suatu hamparan panorama indah alam propinsi termuda di republik tercinta, Timor Timur.

Dari ketinggian itu, disana-sini nampak pegunungan karang dan bukit-bukit terjal yang membentang dari arah Barat ke Timur. Dengan lama penerbangan sekitar 35 menit dari Bandara "El Tari", Kupang, pesawat yang ditumpangi Tim Redaksi Indonesia Membangun mendarat dengan mulus di Bandara "Komoro", Dili, Timor Timur.

Propinsi yang dibatasi di sebelah Utara oleh Laut Sewu dan di sebelah Selatan dengan Laut Timor mempunyai beberapa pulau besar, seperti : Pulau Alor, Atauro dan Pulau Jaco.

Mungkin tidak berlebihan bila dikatakan, di propinsi ini terpendam kekayaan yang memerlukan tangan-tangan terampil, ibarat mutiara yang belum didulang.

Pemandangan dari udara seperti yang diuraikan dimuka, memang menakjubkan dan sangat indah. Kiranya tidak berlebihan untuk dipuji, disamping bahwa pulau Timor Timur juga terkenal dengan Kopi Timor Timurnya dari jenis "Hibrida de Timor". Konon komoditi ini merupakan salah satu jenis kopi terbaik di pasaran dunia dewasa ini.

Lebih menakjubkan lagi bila kita simak, bahwa propinsi Timor Timur kini sudah mampu membayar pajak nasional sebesar Rp 5 milyar/setahun. Ini merupakan hal yang luar biasa, mengingat jumlah penduduk baru mencapai 600.000 jiwa dan tergolong ekonomi lemah.

Lima Skala Prioritas Pembangunan

"Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Propinsi Timor Timur, berbeda dengan pelaksanaan pembangunan di propinsi lain di seluruh Indonesia". Demikian antara lain penjelasan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Timor Timur, **Drs AB Saridjo,** ketika menerima Tim Redaksi Indonesi Membangun di ruang kerjanya, awal Desember 1986, di Dili.

Karena itu, kurang relevans apabila membandingkan keberhasilan pembangunan propinsi di Jawa, dengan tingkat keberhasilan pembangunan di Propinsi Timor Timur.

Untuk mengatasi ketinggalan atau kesenjangan tingkat pembangunan, dilakukan berbagai upaya dengan mengadakan lima skala prioritas pembangunan di Propinsi Timor Timur.

Kelima skala prioritas pembangunan, menurut Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Timor Timur adalah pembangunan bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan darat dan pembinaan aparatur pemerintahan.

Lebih lanjut, **Drs AB Saridjo** menambahkan, dengan kelima skala prioritas pembangunan bidang tersebut semua pembangunan di berbagai bidang akan tercakup dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian diharapkan, azas pemerataan pembangunan di 442 desa yang ada di Propinsi Timor Timur dapat tercapai.

Hal ini memang cukup beralasan, sebab sejak propinsi ini dijajah pemerintahan kolonial Portugis, pembangunan antara desa dengan ibukota propinsi sampai menyolok perbedaannya. Pada masa itu, jalan-jalan aspal barulah sampai di kota Dili dan sekitarnya. Tetapi kini pengaspalan jalan sudah menjangkau 13 kabupaten. Diharapkan dalam akhir Pelita IV semua kabupaten sudah dapat dijangkau oleh sarana jalan aspal.

Memang diakui, propinsi ini baru mulai melaksanakan pembangunan murni mulai tahun 1983. Sehingga tahun-tahun sebelumnya, praktis baru dalam tahap konsolidasi.

Dapat dikatakan, baru dalam tahun 1983, Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan petunjuk khusus dari Departeman Dalam Negeri. Dan baru dalam tahun anggaran 1984/1985, secara utuh Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara murni dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan program pembangunan seperti yang dilaksanakan propinsi lainnya.

Tidak berlebihan bila dikatakan, tingkat keberhasilan pembangunan sebelum tahun 1983 seluruhnya dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan dari Pusat. Seperti program-program yang berbentuk Satgas (satuan tugas) dan bersifat crash program.

FLYING in F—28 of Garuda at a cruising height of 15.000 feet (about 5.000 meters) can provide a beautiful panorama of East Timor, the youngest province of the Republic of Indonesia.

Stretching from west to east is a mountain chain of coral rock and steep hills. After 35 minutes flying from "El Tari", the airport of Kupang, an editorial team of 'Indonesia Membangun' landed at "Komoro", the airport of Dili, East Timor.

The northern side of the privince is bounded by Sewu Sea and in the south by Timor Sea. There are large islands, such as Alor, Atauro and Jaco Island.

It may not be exaggerating to say that below the surface of this province there is much hidden wealth, awaiting skillful hands. East Timor has other things than the beautiful panorama from the air. Its coffee is weel-known, the 'Hibrida de Timor'. It is said to be one of the best coffee in the present world market.

It is even more amazing if we consider that East Timor Province is now able to pay Rp5 billion per year in national tax. This is extraordinary with a population just reaching 600.000 and classified as economically weak.

scale five of Development Priorities

*"In principle, the implementation of development in all sectors in East Timor Province is unlike that in other provinces throughout Indonesia". This was stated by **Drs AB Saridjo,** Provincial Secretary of East Timor when receiving the editorial team of 'Indonesia Membangun' in his Dili office, early December 1986.*

Therefore, it is less relevant to compare the success of provincial development in Java with the level of success achieved in East Timor. To overcome this gap, among the various efforst undertaken are the five scales of development priorities in East Timor Province.

According to the Provincial Secretary, the five scales deal with the sectors of development in agriculture, education, health, land communication and upgrading of government apparatus. It is hoped, Drs AB Saridjo continued, that the five scales will cover all sectors of development and mutually supporting and as such will achieve the principle of equitable distribution of development in the 442 villages in East Timor.

The above is not without reason. During Portuguese colonization, there was a striking difference in development between village and the provincial capital. At that time, asphalted road was restricted to the city of Dily and surroundings. But to date, asphalted road has spread to 13 districts. It is hoped that by the end of Pelita IV, all districts can be reached by asphalted road.

Indeed, this province has only started with real development not until 1983. Prior to that, it was practically a consolidation phase.

It was in 1983 that the Provincial Government of East Timor started preparing a Regional Budget with special guidance from the Home Affairs Department. It was only in fiscal or budget year 1984/85 that the Provincial Government of East Timor prepared an actual Regional Budget and started development according to a program like the other provincies.

So, actually prior to 1983, the level of success in development was due to the policy from the Central Government, such as programs in the form of Task Force with the nature of a crash program.

*On the problem of development success in this province, **J Manurung,** head of Public Relations Bureau of the Provincial Government voiced almost the same opinion as the Provincial Secretary. Manurung said: "In mathematical sense, the present level of development success is 500%, particularly when compared with the time of Portuguese colonization, prior to the integration in 1976".*

Meanwhile, the per capita income of the East Timorese is quite encouraging. Early 1976, the income was only 46 dollars, in 1976 increasing to 168 dollars per annum.

*This information would be incomplete it comment on development success is only from the government's side. What did **Alberto** and **Carlos** have to say, as members of the younger generation after integration.*

Menyinggung masalah keberhasilan pembangunan di propinsi ini, pendapat Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah, **J. Manurung,** senada dengan yang dikatakan Sekretaris Wilayah Daerah, yang antara lain mengatakan :

"Jika diukur secara matematika (menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat) tingkat keberhasilan pembangunan sekarang mencapai 500%. Terutama bila dibandingkan dengan masa penjajahan Portugis, sebelum integrasi tahun 1976".

Sementara pendapatan per kapita tiap penduduk juga menampakkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Digambarkan, bila di awal tahun 1976, pendapatan baru mencapai 40 Dollar, dalam tahun 1986 sudah meningkat menjadi 168 Dollar setahun.

Mungkin kurang lengkap bila informasi tentang keberhasilan pembangunan propinsi ini hanya diperoleh dari pihak aparat pemerintah. Ada baiknya bila kita simak pernyataan-pernyataan polos dan lugu dari **Alberto** maupun **Carlos,** dari kalangan muda yang merupakan generasi produk sesudah integrasi.

Alberto adalah seorang pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di kota Dili, yang bekerja di hotel Dili dari pagi hingga siang hari. Praktis sekolahnya dilakukan pada siang hari hingga menjelang malam.

Pemuda berusia sekitar 19 tahun, mengemukakan pendapat tentang pembangunan di wilayah kelahirannya. "Terus terang di kota Dili sekarang banyak sekali hasil-hasil pembangunan", katanya dalam bahasa Indonesia beraksen Portugis. Sekolah dan prasarana olahraga banyak dibangun pemerintah dan pembinaan generasi muda sangat mendapat perhatian. Sehingga ia sebagai pemuda Indonesia kelahiran Timor Timur merasa bangga dan optimis untuk turut membangun daerahnya.

Sementara, **Carlos** (18 tahun) mengutarakan kebanggaannya, ia sebagai putra Timor Timur sudah merasakan kebebasan.

Banyak teman-teman yang sudah masuk pramuka dan dikirim ke Jakarta. Sedangkan di kota Dili, sudah banyak datang orang-orang dari berbagai suku bangsa. Sehingga menambah banyak perbendaharaan tentang keanekaragaman suku bangsa Indonesia.

Langka Tenaga Terampil

Suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari, bahwa pada pelaksanaan suatu program pembangunan selalu terdapat kendala maupun hambatan. Hambatan pembangunan di propinsi Timor Timur secara garis besar menurut **J Manurung** adalah :

Pertama, masyarakat umumnya belum siap mental menerima alih teknologi. Sebagai contoh, dahulu Pemerintah Daerah mendatangkan alat "Luku" (bajak) untuk membajak sawah. Ternyata masyarakat di sana belum mau menerima dan masih mempertahankan alat tradisional.

Kedua, kurang tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Untuk mengatasinya didatangkan tenaga-tenaga terampil dari propinsi lain di Indonesia.

Ketiga, faktor komunikasi (bahasa). Sebab umumnya masyarakat di daerah ini terutama yang telah berumur tua, tidak dapat berbahasa Indonesia. Mereka-mereka yang dapat berbahasa Indonesia kebanyakan dari golongan pelajar dan mahasiswa.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk menanggulangi permasalahan tenaga kerja ialah mendatangkan dari propinsi lain dengan persyaratan yang dikirim "petani teladan" dan umumnya yang berasal dari Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para petani teladan itu dewasa ini ditempatkan di Bobonaro dan Covalima.

Tingkat Kesehatan Masyarakat Tinggi

Salah satu skala prioritas pembangunan di daerah ini, yakni bidang kesehatan. Sependapat dengan program pemerintah daerah tentang 5 (lima) skala prioritas menarik untuk disimak pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Timor Timur, **dr Sasongko, MPH.**

Dikatakan bila diperbandingkan dengan angka, menurut **Sasongko,** keadaannya adalah : jaman Portugis Propinsi Timor Timur baru mempunyai 1 RS (Rumah Sakit) Umum. Kini, ujarnya, sudah mempunyai 3 buah RS (Rumah Sakit). Masing-masing di Dili 1 buah, Bacau 1 buah dan Bobonaro 1 buah.

Namun demikian memang diakui, penyakit malaria masih merupakan penyakit rakyat yang dominan, menyusul penyakit kulit dan TBC.

Diakui oleh Kakanwil Departemen Kesehatan masalah yang dihadapi dalam menanggulangi kesehatan saat ini di Timor Timur adalah kurangnya tenaga dokter dan para medis. Karena itu melalui SPK (Sekolah Perawat Kesehatan) di Dili dan Filial Kebidanan, akan dapat mendidik dan menyediakan 80 tenaga para medis untuk 3 Rumah Sakit Dili, Bacau, Bobonaro dan Puskesmas di kabupaten maupun kecamatan, di seluruh propinsi.

Menurut Kakanwil, upaya untuk menanggulangi kekurangan sarana dan prasarana di bidang kesehatan di wilayah ini dilaksanakan melalui

__Alberto__ (19 years) is attending afternoon classes at the Senior High School in Dili. In the morning until noon he works at the hotel Dili. Speaking in Indonesia with Portuguese accent, he said: "Frankly speaking, there is so much development progress in Dili. Schools and sports infrastructure have been built by the government and the guidance of the younger generation has full attention. As a young Indonesian born in East Timor, I am proud and join with optimism in the development of the area".

Meanwhile, Carlos (18 years) is proud to be free as a son of East Timor. Many friends have joined the scout movement and sent to Jakarta. With many people from various ethnic groups now coming to Dili, the diversity in the Indonesian community is better reflected.

Lack in skilled personnel

Lack or shortage in skilled personnel is a fact which constitutes contraints in carrying out development. According to J Manurung, in brief those constraints are as follows:

__Firstly,__ mentally, the public in general is not yet ready for transfer of technology. As an example, the regional government once introduced plows to an area for tilling the rice field, but the local people were not receptive and prefer the traditional tool.

__Secondly,__ Shortage of skilled labor and ready-for-use. So, skilled manpower is acquired from other provinces in Indonesia.

__Thirdly,__ the communication factor (language), because generally people in this area can not speak the Indonesia language, especially among the elder people. Those who can speak are mainly students. One of the Government's steps to overcome this manpower problem is by recruiting from other provinces with the condition that those who come are model farmers, and they generally come from Bali, East Java and Central Java. The model farmers are now placed in Bobonaro and Covatima.

High Level of Public Health

The health sector is one of the five scales of priorities and it is interesting to note the comment by __dr Sasongko, MPH,__ Head of the Regional Office, Department of Health, East Timor Province.

If expressed in figures, according to dr Sasongko, the comparison will be as follows: during the Portuguese period, East Timor had only one general hospital. To date, there are three, respectively in Dili, Baucau and Bobonaro.

Nevertheless, it is recognized that malaria is still a dominant public disease, followed by skin disease and Tuberculosis (TBC). Dr Sasongko admitted, that the health sector is faced with a shortage pf doctors and paramedics. Therefore, with the Nursing School and its Midwives branch, can be trained and probide 80 paramedics for the three hospitals in Dili, Baucau, Bobonaro and Public Health Centres in the district as well as sub-district throughout the province.

According to dr Sasongko, to overcome shortage in health facilities and infrastructure in this area the following steps are made: building a Health Laboratory Centre (BLK); Harbour Health Office; Nursing School (SPK); building a pharmacy warehouse and DDT storage; and in each district a Public Health Centre and a Mobile Public Health Centre and a special place for treating patients.

By November 1986, the number of health personnel in the East Timor territory reached 1.966 persons. This is evidence for the rapid progress in the health sector, stressed dr Sasongko, MPH. He continued: "if early in 1976 there was only one dentist, now it incrensed to 11 dentist, while the number of general practitioners increased from 12 to 112 by November 1986. And so, the ratio of doctor and population is 1 : 7.000, meaning one doctor for 7.000 persons.

Agricultural Production Centre

Agricultural Production Centres in this province can be found in the districts of Baucau, Maliana, Manotuto, Lautens, Viqueque and Ermera. But among the districts, cultural-wise there is competition or difference. As an example, people in Baucau district are more advanced, because for a long time they have worked in the rice field, compared with the people in Maliana district at the border with East Nusa Tenggara (NTT). Though there is enough land in Maliana district, but for a long time they have lived in the mountains with their system of shift-farming.

Aside from the people in Baucau district, those in the districts of Manatuto, Lautens Viqueque and part of Ermera also work on rice fields. Progress in rice production in this territory is quite encouraging. As an example, the farmer in Vemasse (Baucau district), Bacali Cairabella and the Seisal Valley at Lautens can produce unhusked price at an average of about four to six tons per hectare.

kegiatan seperti : Pembangunan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK); Kantor Kesehatan Pelabuhan; Sekolah Perawat Kesehatan (SPK); Pembangunan gudang farmasi dan gudang DDT. Di setiap Kabupaten disediakan Puskesmas, Puskesmas Keliling dan tempat perawatan khusus pasien.

Hingga bulan Nopember 1986, wilayah Timor Timur jumlah tenaga kesehatan sudah mencapai 1.966 orang. Ini membuktikan bahwa tingkat kemajuan bidang kesehatan pesat, tandas dr Sasongko MPH. Dijelaskan lebih lanjut : bila dokter gigi di awal tahun 1976 baru 1 orang, kini meningkat menjadi 11 orang dokter gigi. Sementara untuk dokter umum hingga Nopember 1986 mencapai 112 orang, sebelumnya baru 12 orang dokter. Dengan demikian tingkat perbandingan antara jumlah dokter dan penduduk 1 berbanding 7.000 orang, dengan pengertian 1 dokter melayani kesehatan 7.000 penduduk.

Sentra Produksi Pertanian

Sentra produksi pertanian di propinsi termuda ini masing-masing terdapat di Kabupaten Bacau, Maliana, Manotuto, Lautens, Viqueque dan Kabupaten Ermera. Namun demikian antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya kulturnya bersaing atau berbeda.

Sebagai contoh, penduduk Kabupaten Bacau lebih maju. Karena sudah sejak dahulu bekerja di sawah dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Maliana di perbatasan dengan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun Kabupaten Maliana lahannya cukup luas tetapi sejak dahulu mereka hidup di gunung-gunung dengan sistem ladang berpindah-pindah.

Selain penduduk di Kabupaten Baucau, penduduk Kabupaten Manatuto, Lautens Viqueque dan sebagian penduduk Kabupaten Ermera juga mengerjakan lahan persawahan. Kemajuan produksi sawah di wilayah ini juga cukup menggembirakan. Sebagai contoh, petani di Vemasse (Kabupaten Baucau), Bacali Cairabella dan Lembah Seisal di Lautens dapat menghasilkan padi gabah rata-rata sekitar 4 sampai 6 ton per hektarnya.

Barangkali tidak berlebihan pendapat ahli yang mengatakan bahwa sesungguhnya Propinsi Timor Timur cukup potensial. Masalahnya di masa mendatang adalah bagaimana mengelola dan mengembangkan terus tingkat produksi dan surplus produksi padi.

Penghasil kopi terbaik

Propinsi Timor Timur terkenal dengan komoditi kopi. Ini sudah diakui di pasaran internasional. Memang tidak berlebihan bila dikatakan aroma kopi daerah ini mempunyai kekhasan tersendiri. Banyak pendapat mengatakan, tidaklah lengkap bila kita sebagai pecandu kopi belum mencoba kopi Timor Timur. Kopi Timor Timur dahulunya diekspor ke Portugal dan Mozambique. Setahunnya kadang-kadang mencapai 3000 ton. Konon masa kejayaan "kopi" dalam dekade 1972, dimana produksinya mencapai 92% dari seluruh ekspor daerah ini. Menurut catatan, tahun 1968 ekspor kopi sebesar 2.919 ton, tahun 1969 sebesar 2.797 ton, tahun 1970 sebesar 3.827 ton, tahun 1971 sebesar 4.400 ton dan dalam masa keemasan mencapai 5.908 ton. selain itu kopi daerah ini juga mencakup jenis Robusta dan Arabica yang dalam tahun 1979/1980 diekspor ke Singapura sejumlah 3.235,895 kg.

Daerah-daerah penghasil kopi yang potensial adalah Ermera, Liquica, Aileu dan Same. Dalam tahun 1982 luas areal kopi mencapai 44.560,64 hektar. Produksi kopi di awal integrasi merosot tajam. Ini diakibatkan arel kopi rakyat tidak terurus dan banyak ditinggalkan. Karena alasan keamanan, selain kurang peremajaan. Namun sejak tahun 1978, di Lospalos dan Maliana dibangun pembibitan tanaman dan sudah disemaikan 1.000.000 pohon kopi.

Bobonaro penghasil beras

Tanpa diduga kabupaten Bobonaro yang berpenduduk 78.000 jiwa (tahun 1978) mampu menghasilkan 23.613 ton equivalent beras. Padahal keperluannya hanya 11.529 ton equivalent beras per tahun. Berarti Bobonaro tiap tahun surplus produksi 9.353 ton equivalent beras. Sebagai perbandingan, dalam Pelita III jumlah penduduk Timor Timur 600.000 jiwa. Bila jumlah penduduk tetap, keperluan bahan makanan khususnya beras hanya berkisar 89.950 ton equivalent beras.

Kaya bahasa

Sesungguhnya kebudayaan tradisional yang tumbuh dan hidup di wilayah ini, jelas menunjukkan persamaan dengan di beberapa daerah Indonesia lainnya. Seperti misalnya dibidang kesenian ataupun pakaian tradisional yang umum dipakai juga di beberapa daerah lain di Indonesia. Selain itu di Timor Timur terdapat sekitar 30 kelompok etno linguistik yang masing-masing etnis mempunyai bahasa sendiri. Secara umum, bahasa yang digunakan dapat dibagi dua keluarga linguistik. Yaitu bahasa Austronesia yang terdiri bahasa **BUNAK, KEMAK,**

It could be that the experts are not exaggerating by commenting that actually, East Timor Provinces has sufficient potential. The problem in the future is how to manage and continuously raise the level of production and surplus of paddy production.

Producer of the best coffee

East Timor province is well-known for its coffee commodity which is recognized in the international market. It has a specific aroma and for real coffee lovers? Undoubtedly, it is a must to taste and try East Timor coffee. The product as previously exported to Portugal and Mozambique, sometimes reaching 3.000 tons annually. In the 1970's, when coffee had its period of glory, production reached 92% of the export from this area.

According to records, coffee export in 1968 was 2.915 tons, in 1969: 2.797 tons, in 1970: 3.827 tons, in 1971: 4.400 tons and reached its peak of 5.908 tons during the glorious period. In addition, there is also Robusta and Arabica coffee with a total export of 3.235,895 kg to Singapore in 1979/1980.

Potential coffee producing areas are Ermera, Liquica, Aileu and Same. In 1982, the coffee area was 44.560,64 hectares. During the early period of integration coffee production dropped sharply because many smallholders' coffee plantations were neglected and abondoned due to security reasons and the lack of rejuvenation. But since 1978, seedling centres were established in Lospalos and Maliana and up to 1.000.000 coffee seedlings produced.

Bobonaro, the rice producer

Unexpectedly, the district of Bobonaro with a population of 78.000 persons (in 1978) was able to produce the equivalent of 23.613 tons of rice, while annual requirement was only 11.259 tons and as such Bobonaro had a surplus of 9.353 tons of rice equivalent. As a comparison, in Pelita III, East Timor's population was 600.000 persons. If the figure remained constant, food requirement especially rice will be about 89.950 tons of rice equivalent.

Rich in language

Actually, the traditional culture which has been growing and existing in this area, shows obvious similarities to those in several other areas of Indonesia. As an example, the art of traditional dress which is generally also worn in other parts of Indonesia.

*East Timor, in addition, has about 30 ethno-linguistic groups, each with their own language or dialect. In general, the language used can be divided in two categories, i.e. Austronesian language consisting of **Bunak, Kemak, Makadai, Dgada, Idata, Kairui, Nikidi and Baibenu.***

*While the unit of traditional authority is **RAI** (kingdom) Meaded by a king, **Liurai**, who is assisted by a **Mucair Fukun** and a **Dato Uain.** Each **Rai** supervises a smaller kingdom (Suco or suku) with its leader elected by the people. The traditional leader (ship) should have the approval of the **Chef de Suku.** The community is divided into social strata, i.e. **Dato** or nobility, **Ema**, the common people and the slaves. While clan is kinship of general character is socio-cultural life and exogam is the marriage system.*

People in this territory who live along the coast are generally fishermen, their prime means of living, catching fish in a very primitive way. The fishermen go to sea around the coast of Dili and Atauro island using shore dragnets of 200 m length. This net is dragged by 12 persons and their daily catch is about 20 to 30 Kg fish which they sell directly to the market.

City of a thousand texis

Dili is a coastal city with gentle sloping beach and white sand facing Atauro island. The city gives the impression of a print, the shape of buildings and flat road segments forming regular blocks. City transport is unlike other cities in Indonesia. In Dili you will not find type V transport such as becak (tricycle), 2-wheeled horse-drawn carriages (delman), bemo or motorised becak, bajaj and mikrolets (small buses). People in Dili give preference to taxis, and no wonder they are criss-crossing all over the city. The fare for short distance is Rp500 (five hundred rupiah), that is in the city. at any time of the day or night, there is no transportation problem.

Tourism Potentials

East Timor has the potentials to be developed as a tourist area because of the following:

a advantageous geographical location, between the Australian continent and the Archipelago, as a bridge for the flow of tourists from Australia before proceeding to other areas of Indonesia.

b airport infrastructure, such as Baucau airport with international standard which can serve DC—10s.

MAKASAI, DGADA, IDATA, KAIRUI, KINIDI dan **BAIBENU.**

Sedang satuan kekuasaan tradisional RAI (kerajaan) dan rajanya disebut Liurai yang dibantu **MUCAIR FUKUN** dan **DATO UAIN.** Setiap **MAI** membawahi kerajaan kecil (Suco atau suku) dan pimpinan suku dipilih rakyat. Pimpinan tradisional harus mendapat persetujuan **CHEFE DE SUKU.** Masyarakat terbagi dalam strata sosial yaitu **DATO** atau ningrat, kaum **EMA** atau marga bebas dan kaum Budak. Sementara klen merupakan kekerabatan bersifat umum dalam kehidupan sosial budaya dan sistem perkawinannya eksogam.

Penduduk wilayah ini yang tinggal di tepian pantai, umumnya mempunyai mata pencaharian nelayan. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara masih sangat sederhana sekali. Nelayan-nelayan beroperasi di laut sekitar pantai Dili dan Pulau Atauro dengan memakai pukat pantai. Panjang pukatnya mencapai 200 meter. Setiap pukat ditangani 12 orang dan setiap hari memperoleh 20 sampai 30 kilogram ikan yang langsung dijual ke pasar.

Kota seribu taksi

Kota Dili letaknya di tepian pantai yang landai dan berpasir putih menghadap ke Pulau Atauro. Kota berkesan dicetak, karena bentuk bangunan dan ruas jalan rata dan mendatar membentuk blok-blok teratur. Tapa ada jalan mendaki dan menurun. Angkutan kotapun tidak selazim daerah lain di Indonesia. Di Dili angkutan jenis V seperti halnya becak, delman, bemo, mikrolet dan bajaj tak nampak. Justru transprotasi yang membudaya dan melekat di hati masyarakat adalah taksi.

Tidak mengherankan, bila kota yang tidak luas itu, setiap saat berlalu-lalang taksi. Dengan ongkos Rp 500,- jarak dekat, (artinya untuk satu taksi dalam kota red.) kita dapat bepergian. Kemana kita jalan dan melangkah baik siang maupun malam, tak perlu risau kesulitan kendaraan.

Timor Timur mempunyai potensi pariwisata yang cukup potensial untuk dikembangkan antara lain :

a. Melihat letak geografis yang menguntungkan yakni terletak antara Benua Australia dengan kepulauan Nusantara, merupakan jembatan arus wisata dari Australia sebelum menuju ke daerah Indonesia lainnya.
b. Mempunyai prasarana pelabuhan seperti Bandar Udara Baucau yang setaraf Internasional yang dapat didarati DC-10.
c. Mempunyai keindahan alam yang menarik disamping iklim yang beraneka ragam yang mana dalam jarak yang tidak terlalu jauh orang akan dapat menikmati udara laut dan udara pegunungan.
d. Memiliki monumen-monumen sejarah peninggalan Portugis seperti, benteng-benteng yang hampir terdapat di seluruh wilayah, patung-patung, rumah dan gereja yang berarsitektur Spanyol bercampur dengan kebudayaan Portugis.
e. Mempunyai tarian tradisional yang cukup menarik dan beraneka ragam seperti : Tebedai, Deikobo, Tabe liku, Likurai, dan ditambah adanya beberapa upacara adat yang menarik bagi wisatawan.
f. Mempunyai seni artistik miniatur rumah adat, kain tenun rakyat, serta kerajinan keramik yang dapat dikembangkan sebagai barang-barang souvenir.
g. Keadaan perairan pantai laut yang jernih dengan berbagai jenis ikan hias dan karang-karang yang indah memungkinkan untuk dikembangkan menjadi tempat wisata "Taman Laut", sport-diving, surving, selancar angin dan olahraga layar.
h. Terdapatnya danau-danau seperti Danau Iralaloro yang berhawa sejuk dengan satwa burung yang beraneka ragam jenisnya, Danau air asin Tasi-Tolu di Liquisa mempunyai daya tarik tersendiri sebagai tempat wisata.

Potensi Wisata

Sesungguhnya dalam kotapun mengandung potensi wisata terpendam yang menarik dipandang. Banyak bangunan baik itu kantor Pemerintah, rumah penduduk maupun tempat-tempat peribadatan bernilai arsitektur dan historis tinggi.

Bila kita berjalan-jalan di tengah kota, menyusuri jalan yang teratur bersih, nampak berdiri megah Kantor Gubernur dengan arsitektur Spanyol. Sementara di tengah desiran ombak menghempas tepian jalan, dekat Patung **Bunda Maria,** ada hotel cukup representatif. Terutama untuk menampung turis-turis, baik asing maupun domestik. Tak jauh dari sana ada hotel tua. Namun bagi mereka yang pernah ke Dili, tentunya mempunyai kenangan tersendiri. Walaupun sederhana namun cukup baik dan layak untuk menampung wisatawan yang ingin bernostalgia.

Selain itu, di tengah keramaian kota, dekat Kantor Pos bertengger dengan megah maket mini rumah tradisional desa Rasa di Lospalos.

c beautiful landscape, a variety of climate, mountain as well as sea air within reasonable distance.
d historical monuments as legacy of Portuguese colonization, such as fortresses almost throughout the territory, statues, houses and churches with Spanish architecture mixed with Portuguese culture.
e a variety of attractive traditional dances such as: Tebedai, Deikobo, Tobeliku, Likurai, in addition to traditional ceremonies which will be attractive for tourists.
f the art of miniature traditional house, cloth weaving, ceramics handicraft which can be developed as souvenirs.
g clean seawater along the coast with various ornamental fish and beautiful rocks which can be developed into sea gardens for sports such as diving, surfing, wind surfing and sailing.
h lakes, such as lake Iralaloro in a pleasant climate with a variety of birds species, lake Tasi-Tolu with its salt water in Liquisa will give its own attraction.

Actually, the city offers enough potentials, whether government buildings or houses of the people, places of worship, all with high architectural and historical values.

In the heart of the city is the Governor's Office, majestically in Spanish architecture. At the seaside near the statue of Mother Maria is a good hotel to accommodate foreign as well as domestic tourists. Not far away is an old hotel, with memories for oldtimers. It is modest, but proper for those with nostalgic moments in the past.

In the centre of the city, near the Post Office is a miniature of a traditional house of Rasa village in Lospalos, reminding us of the high culture of the East Timorese.

Welcoming guests in Dili is the Integration Monument, symbol of a very determined will as if giving a challenge.

*Houses of worship are sufficient, churches and mosque, and in good condition. Worth noting is the **Hosana** Catholic church.*

Another tourist attraction is nature's gift, the white sand along the beach from Dili stretching to Manatuto and Likisa. And with proper care, people in East Timor will have a "Kuta beach" like in Bali.

A Forum of Direct Dialogue

*The Governor of East Timor Province is **Ir Mario Viegas Carrascalao,** a graduate in forestry of the Instituto Superior de Agronomia, Universitas Technica de Lisboa, has his own method of approach, particularly in accommodating all complaints and problems faced by the people in daily life.*

With the system of while-open-door policy for the people, the Governor whos is known as a hard worker, accurate, perseverance and firm, reserves every Friday afternoon, after office hours, to receive people for direct dialogue. This can last until 22:00 Hours, which means that not only the Governor, but also his staff has extra work on that day.

This dialogue, according to a PR staff to the editorial team of 'Indonesia Membangun' is held in the conference room of the Governor's office in Dili, open to the public. It has the character of a family meeting, a dialogue between father and his children. The Governor, assisted by his staff, will listen to all questions, complaints, embitterments and what else. Sometimes the nature is general, personal or even political.

And it is surprise when suddenly, amusing things are voiced according to city standards. But for the majority who come from the rural area with their simple mind, it can be a matter of principle.

The Governor will give serious attention and response to all the problems and input, even though it may be of a personal nature. People do not come from Dili alone, but also from far away, three to four days on the road, such as from the districts of Lautem, Baucau, Viqueque, Manufahi, Ainaro, Covalima, Bobonaro, Ermera, Aileu, Liquisa, Manatuto, even from Ambenu. Sometimes it is an emotional scene, seeing some of them without shoes, from far away, isolated villages in the mountains.

In this forum, most of them use Tetun, the local language, and very few use Portuguese or Indonesian language. This 'Friday forum' is well-known among the public, and in the eyes of some considered as a successful approach and problem solving. The family atmosphere has its advantage, what cannot be solved in the field is handled by the Governor who is fluent in Portuguese, Spanish, French and Italian. He is trying to find a solution through guidance and family spirit.

Integration, the golden bridge

*Integration is the golden bridge to raise the living standard of the East Timorese, toward a just and prosperous live. It's interesting to quote a speech by East Timor's Deputy Governor, **Francisco Xavier Lopes Da Cruz,** on 17 July 1981 in Dili, at a ceremony commemmorating the 5th Anniversary of East Timor Province: "Commemmorating Integration Day is reminding us of a happy day, when after long and dark nights of colonialism, finally the people of East Timor can again enjoy the sunshine of freedom and independence when we reunited with our brothers and sisters of the same*

Ini mengingatkan kita akan nilai budaya tinggi rakyat Timor Timur. Menyambut para pendatang di Dili, monumen Integrasi simbol kebulatan tekad rakyat seakan memberi tantangan.

Sementara tempat peribadatan cukup tersedia dan kondisinya baik. Utamanya Gereja **Hosana,** Gereja Katholik dan mesjid-mesjid.

Potensi wisata alam lain yang tak kalah menarik, pantai pasir putih membentang dari Dili sampai Manatuto. Niscaya bila kekayaan alam itu digali dan ditata baik, kita akan memiliki pantai "Kuta" kedua sesudah Bali.

Forum dialog langsung

Gubernur **Ir Mario Viegas Carrascalo,** yang tamatan bidang kehutanan pada Instituto Superior de Agronomia, Universitas Tecnica de Lisboa itu, mempunyai upaya dan metode pendekatan tersendiri. Terutama dalam menampung semua keluhan dan masalah yang dihadapi rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan sistem membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat, Gubernur yang terkenal pekerja keras, teliti, tekun dan tegas ini meluangkan waktu bagi warganya berdialog langsung tiap Jum'at sore sesuai jam kantor.

Tidak mengherankan, bila di hari Jum'at tiap bulannya, waktu kerja Gubernur beserta staf bertambah. Terkadang hingga pukul 01.00 malam, ujar seorang Staf humas kepada "Tim Indonesia Membangun".

Forum dialog yang dilaksanakan di salah satu ruangan rapat Kantor Gubernuran di Dili, terbuka untuk umum dan bersifat bebas. Artinya, siapa saja dapat mendengarkan.

Acara yang bersifat kekeluargaan itu nampak sebagai forum tukar fikiran antara sang Bapak dengan anaknya. Dalam forum biasanya Gubernur didampingi para pejabat teras Pemda, akan menampung dan menerima semua keluhan, uneg-uneg maupun pengaduan. Baik sifatnya umum, pribadi maupun politis.

Tak mengherankan bila tiba-tiba muncul dalam Forum hal-hal yang terkadang lucu untuk ukuran masyarakat kota. Tetapi malah bagi sebagian besar masyarakat di desa-dea Timor Timur yang masih lugu dan polos merupakan hal mendasar dan prinsip.

Namun semua keluhan dan aspirasi rakyat itu, tetap merupakan bahan pemikiran Gubernur. Karenanya tetap ditanggapi dan diterima dengan serius, walaupun terkadang hanya permasalahan pribadi.

Umumnya rakyat yang datang untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan, tidak sekedar datang dari Dili semata. Melainkan datang dari jauh yang terkadang memakan waktu 3 - 4 hari perjalanan. Seperti dari kabupaten Lautem, Baucau, Viqueque, Manufahi, Ainaro, Covalima, Bobonaro, Ermera, Aileu, Liquica, Manatuto bahkan dari Ambenu. Bahkan lebih mengharukan, terkadang mereka berjalan kaki tanpa alas kaki, jauh dari desa terpencil di gunung-gunung.

Mereka-mereka yang ingin berkonsultasi dan menyampaikan segala permasalahan terlebih dahulu diwajibkan mendaftarkan di Humas Pemda, untuk didaftar dan diberikan waktu kapan bisa mengikuti forum dialog itu.

Dalam forum dialog, sebagian warga umumnya menyampaikan semua keluhan dengan bahasa daerah (Tetun), Portugis dan bahasa Indonesia bagi yang mampu.

"Forum Jum'at" yang banyak dikenal di lingkungan masyarakat itu, dinilai beberapa kalangan di Timor Timur sebagai cara pendekatan dan pemecahan yang dianggap berhasil. Karena dengan upaya pendekatan yang bersifat kekeluargaan itu, semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan damai. Sehingga apa yang tidak dapat dipecahkan di lapangan, oleh Gubernur yang menguasai bahasa Portugis, Spanyol, Perancis dan Italia, dapat diselesaikan melalui cara sederhana yang bersifat membimbing dan kekeluargaan.

Integrasi jembatan emas

Integrasi merupakan jembatan emas untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Timor Timur, menuju kehidupan yang adil dan makmur. Menarik untuk diangkat kepermukaan, cuplikan pidato Wakil Gubernur Timor Timur, **Francisco Xavier Lopes Da Cruz,** pada upacara peringatan ulang Tahun ke-5 propinsi, tanggal 17 Juli 1981 di Dili. "Memperingati hari Integrasi adalah mengingat kembali hari yang berbahagia di mana sesudah malam kolonialisme yang gelap dan panjang, rakyat Timor Timur akhirnya bisa menikmati kembali sinar matahari kebebasan dan kemerdekaan ketika menyatukan diri kembali dengan saudara-saudara seasal etnik, ras, historis dan geografis. Untuk orang-orang yang tidak menerima atau tidak mengerti kemerdekaan kita melalui Integrasi yang kita rayakan hari ini, kita menanyakan dan mengatakan : Salahkan seorang anak yang selama ini dipisahkan secara kekerasan kembali kepada ibu yang melahirkannya? Salahkah seorang Ibu untuk memenuhi tuntutan seorang anak yang ingin kembali kepangkuannya ? Biarkanlah matahari memancarkan sinarnya di bumi Timor Timur. Jangan diributkan, kami sudah terlalu lama menderita

ethnical, race, historical and geographical afinities.
For those who do not accept or cannot understand our freedom through Integration which we celebrate today, we ask and say to them: Is is wrong for a child who for so long have been separated by force to return to the Mother who gave birth to him. Is it wrong for a Mother to welcome again the child in her lap? Let the sun shine in East Timor's soil. Do not pay attention, we have suffered too much during the long years of colonization".

And the bridge which is illustrated verbally, has started to take shape. This was obvious when the editorial team of 'Indonesia Membangun' Landed at Komoro airport. From a distance could be vaguely seen the Laclo river bridge at Manatuto, connecting the city of Dili with the eastern part of the area such as Baucau, Viqueque and Lospalos. The Laclo river bridge, 240 m long was officially opened in August 1984 and in passing illustrates the firm and persistent will of the East Timor people to develop their area continuously. So that the ***Balibo*** *Proclamation as a realization of the will of the East Timorese to integrate with Indonesia and free themselves from the chains of colonialism, is starting to bear fruits.*

In a relatively short period, the people of East Timor can feel the success of development. To date, the sons and daughters of East Timor have wide opportunity for education, starting from Primary School up to Higher Learning. About 1380 of them are now enrolled as students at various institutes of higher learning in Java, Kalimantan and Sulawesi. Some of them even sent abroad for study and already returned with satisfying results. A fact that when given the opportunity, people from this province are able to develop themselves and raise the standard of living.

Another evidence still fresh in peoples's mind was the success of two boxers from this area, namely ***Thomas Americo*** *and* ***Francisco Lisboa,*** *both considerably improving the image of East Timor.*

It is indeed not proper to compare the level of development success in East Timor province with the other provinces. When this youngest provinces was still involved in the struggle for integration with Mother Earth, the other provinces were already entering the second Pelita.

But, as expressed by ***President Soeharto,*** *it was not a "big sin":* ***"We should fight together to eliminate the arrears our brothers in East Timor have encountered for so long, so that in the shortest possible period they will achieve the progress which the other areas of Indonesia have already enjoyed".***

---

diperas selama waktu penjajahan yang cukup panjang.

Dan jembatan yang secara harfiah tersirat dari urian itu, kini mulai terwujud. Ini nampak ketika Tim Redaksi dari dalam pesawat terbang mulai mendarat di Komoro. Dari jauh nampak samar-samar jembatan sungai Laclo di Manatuto yang menghubungkan kota Dili dengan daerah-daerah di sektor timur, seperti Baucau, Viqueque dan Lospalos. Jembatan sungai Laclo yang memanjang sekitar 240 meter itu, di bulan Agustus 1984 telah berfungsi dan secara sepintas menggambarkan kekokohan dan kekerasan tekad masyarakat Timor Timur untuk membangun daerahnya secara berkesinambungan. Sehingga Proklamasi **Balibo** yang merupakan realisasi tekad rakyat Timor Timur untuk berintegrasi dengan Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu penjajah mulai menampakkan buahnya.

Dalam waktu yang relatif singkat keberhasilan pembangunan Timor Timur telah dirasakan rakyat. Pada saat ini, putra-putri Timor Timur mendapat kesempatan luas untuk menduduki bangku sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi. Sekitar 500 putra putri Timor Timur sekarang tercatat sebagai mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan sebagian dari putra-putri Timor Timur yang dikirim ke luar daerah untuk melanjutkan study telah kembali dengan hasil menggembirakan.

Kenyataan ini menunjukkan, apabila memang diberikan kesempatan, sesungguhnya rakyat di propinsi ini mampu mengembangkan diri untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bukti lain yang mungkin masih teringat dalam benak sanubari ialah tentang kehebatan putra-putri daerah seperti petinju **"Thomas Americo"** dan **"Fransisco Lisboa".** Namanya harum mencuat dan membawa citra baik Timor Timur.

Memang perlu diingat, membandingkan tingkat keberhasilan pembangunan di propinsi termuda ini dengan propinsi-propinsi lainnya tidaklah tepat. sebab ketika propinsi ini masih dalam gejolak perang saudara menuju integrasi ke Ibu Pertiwi, propinsi-propinsi lain justru sudah memasuki tahapan Pelita II.

Namun demikian bukanlah suatu "dosa besar", seperti dikatakan Presiden Soeharto : "Kita harus berjoang bersama-sama untuk negara mengejar ketinggalan yang selama ini diderita saudara-saudara kita di Timor Timur,agar secepatnya dapat mengejar kemajuan-kemajuan yang telah dirasakan kita semua di daearh-daerah Indonesia lainnya".

DAPUR PENERBIT
THE PUBLISHER

SAAT pimpinan penerbit buku VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN ORDE BARU PELITA I, II dan III menyerahkan buku tersebut kepada Menteri Penerangan RI H Harmoko pada 6 Agustus 1985, Menpen memesankan agar penerbit memulai langkah berikutnya. Yakni membuat catatan-catatan lantas mengumpulkan bahan catatan itu guna dihimpun menjadi buku menyangkut Pembangunan Nasional secara keseluruhan.

Penerbit PT Dumas Sari Warna segera mempersiapkan buku yang tadinya direncanakan dalam judul NUSANTARA MEMBANGUN. Namun nama itu dinilai kurang memperlihatkan penampilan yang lebih terarah. Musyawarah dan mufakat dilaksanakan dengan berbagai pihak yang terkait dengan rencana penerbitan buku menyangkut Pembangunan Nasional seperti petunjuk Menteri Penerangan RI. Lantas dikukuhkan judul buku yang diterima semua pihak yakni INDONESIA MEMBANGUN.

Untuk memperlancar kerja yang bisa difahami betapa rumitnya, dibentuklah Tim Penerbitan Buku Indonesia Membangun yang didukung oleh komponen Departemen Penerangan - Departemen Dalam Negeri - Persatuan Wartawan Indonesia - PT Dumas Sari Warna. Pembagian kerja dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap komponen yang tergabung dalam Kerja Tim.

Kerjasama pun dibentuk sebagai landasan kerja dan kemudahan sebagai kunci untuk mewujudkan buku, diperdapat langsung dari Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Roestam melalui Kepala Biro Humas Depdagri, Drs Feisal Tamin. Tanpa kemudahan-kemudahan dari Menteri Dalam Negeri beserta aparatnya di daerah yakni Gubernur/Kepala Daerah selaku Penguasa Tunggal di Wilayahnya, maka akan terjauh dari lengkap, apa-apa yang bisa dihimpun menyangkut informasi tentang Pembangunan Nasional dari Sabang sampai dengan Merauke.

Penyebar-luasan informasi tentang Hasil-hasil Pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Orde Baru dalam Pelita I, II, III dan IV diseluruh penjuru Tanah Air, merupakan beban bagi eksponen serta komponen Orde Baru keseluruhannya. Tidak tertutup kemungkinan betapa Sektor-sektor yang dimunculkan masih terasa kurang, namun secara informasi dalam arti-an harfiahnya, cukup memadai untuk memperlengkapi hasanah dalam perpustakaan Nasional dan Internasional, tentang gerak melajunya pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu serentak.

Sejarah memperlihatkan betapa sebelum dilaksanakannya Pembangunan Nasional Jangka Panjang (25 tahun) yang mana Pelita I pada tahun 1969 merupakan titik permulaannya, beban berat serta tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,

When the publisher in person, on 6 August 1985, presented to the Minister of Information HARMOKO a copy of VISUALIZATION OF DEVELOPMENT GAINS DURING THE NEW ORDER ADMINISTRATION : PELITA I - PELITA II - PELITA III, the latter urged the former to think up a new publication. It was thus that ***PT Dumas Sari Warna Publishing Co. Ltd*** *started the preparatory works of this book, INDONESIA DEVELOPS.*

A team for the publication of INDONESIA DEVELOPS was then established, involving the Ministry of information, the Ministry of Home Affairs, the Indonesian Journalists Association and a national publisher ***PT Dumas Sari Warna.*** *While the Ministry of Information has provided technical assistance to give weight to the information messages contained in this book, the Ministry of Home Affairs greatly enhanced data coverage through active participation of the Regional Administrations of all 27 provinces of Indonesia in collaboration with technical offices such as the Regional Offices of the Ministry of Information, the Regional Development Planning Boards, etc. Special acknowledgement is hereby extended to the former Minister of Home Affairs, Soepardjo Roestam, who-through Drs Feisal Tamin, then Head of Public Relations Bureau of the Ministry-called upon all Regional Administrations to provide the necessary assistance.*

This book is designed to provide the public a comprehensive information on the National Development of Indonesia managed by the New Order Administration. The scope is nation-wide, the period spans PELITA I (Five-Year Development Programmes I, 1969 - 1974), PELITA II (1974 - 1979), PELITA III (1979 - 1984) and PELITA IV (1984-1989).

The topic covers all fields of development : economy, defence and security, politics and socio-culture. The development includes presidential-aid programmes in addition to sectoral activities such as agriculture, industry, investment, mining and energy, communication, tourism, post and telecommunication, trade, cooperatives, manpower, transmigration, religion, education, social welfare, women's role, population and family planning, housing and settlement, regional/rural/urban development, agrarian affairs, law, information and social communication, science, technology/research, and living environment. Vital projects which are strategic in nature, are given special treatment.

"It is the New Order era which is an era of Development", said Alamsyah Ratu Perwiranegara, then Minister Coordinator for Social Welfare, when receiving INDONESIA DEVELOPS Planning Board. "This must be made record of, for the succeeding generations to consult upon".

Indeed, the old order period was one of scarcity and misery for the people in general. In most regions, especially outside Java, transpor-





Alamsyah Ratu Perwiranegara saat memberi restu pada komponen pelaksana buku ini, "Harus selalu diinformasikan siapa pelaku dan pelaksana Pembangunan Nasional ini. Andai tidak selalu diinformasikan, kelak mereka yang lahir setelah tahun 1960-an menyangka keadaan di Indonesia sudah seperti yang sekarang mereka lihat dan temui. Terusterang, keadaan secara keseluruhan yang ditemui sekarang adalah kerja Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Bapak Pembangunan, Presiden Soeharto. Bukan dikarang-karang, bukan mengada-ada, tetapi sejarah pun mencatatnya demikian. Sebelum tahun 1966, bisa kita tanyakan kepada sejarah, bagaimana keadaan pembangunan di Indonesia".

Bisa dimengerti mengapa Menko Kesra Alamsjah Ratu Perwiranegara menyatakan demikian. Bisa difahami oleh masyarakat Indonesia di mana saja berada, baik yang berdomisili di Sabang sampai dengan Merauke, ataupun mereka yang kebetulan sedang berdomisili di luar Indonesia. Sebelum Pelita I dilaksanakan setiap daerah Tingkat I, II dan III menghadapi hambatan dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Kita ambilkan contohnya pulau demi pulau. Kita mulai dari Sumatera yang terdiri dari 8 (delapan) propinsi. Masyarakat bepergian dari propinsi yang satu ke propinsi yang lain masih dalam lingkungan pulau Sumatera, pastilah menghadapi kesukaran sarana angkutan, jalan-jalan rusak yang sukar ditempuh. Bahkan tak ada jalan sama sekali. Hingga jarak yang relatif dekat, harus menyita waktu yang lama. Andaipun ada angkutan udara, jadwal penerbangannya tak menentu. Pemberitahuan atas pembatalan pemberangkatan ke tempat yang dimaksud, diragukan apabila akan sampai dan diketahui oleh pihak yang dituju. Untuk bepergian ke Merak saja dari Lampung, umpamanya, memakan tempo relatif lama bahkan tidak jarang masyarakat yang ingin bepergian harus menginap dulu di pelabuhan Panjang. Atau sebaliknya yang dari Pulau Jawa, harus nginap dulu di pelabuhan Merak. Inilah gambaran kondisi sebelum Pelita dilaksanakan.

Persoalan yang dihadapi di pulau Jawa lain lagi problemanya. Peledakan penduduk hingga mendesak para petani bercocok tanam dengan methoda sendiri-sendiri guna menanggulangi ancaman kekurangan pangan. Dengan lahan persawahan yang itu ke itu terus, sementara ledakan penduduk mencapai ketinggian yang tak terkontrol, bencana akan muncul setiap saat. Pemerintah Orde Baru sejak Pelita I melaksanakan intensifikasi di berbagai bidang yang langsung terkait kepada Sektor Pertanian. Petani tanpa lahan, mustahil akan mampu berproduksi, betapapun juga hebatnya ketrampilan mereka mengolah lahan persawahan. Jawaban yang langsung terkait dalam permasalah-



tation infrastructures and facilities were far from adequate. Roads were in bad conditions. Flight schedule, if any, was not dependable. And it was not infrequent for travellers to wait ships by days. Meanwhile, the island of Java was heavy with the problems of dense population, high rate of population growth, scarcity of agricultural field and shortage of food production, etc.

Right from the start, the New Order Administration has been aware of the serious problems. Thus, after a period of national consolidation since 1966, planned programmes have been set up since 1969 to overcome them. The answers to agricultural issues include mass intensification, the making of new ricefields, the improvement of arid-









an ini adalah pelaksanaan Transmigrasi, Keluarga Berencana, Pencetakan Sawah Baru (baik tehnis maupun non tehnis, serta Sawah Pasang Surut), serta pembukaan kesempatan kerja di setiap Propinsi di Indonesia.

Kendati pulau Jawa kesukaran lahan persawahan baik padi persawahan tehnis maupun gogorancah, namun akibat pelaksanaan Pelita I, II, III dan IV, pulau Jawa mampu berswasembada pangan, demikianlah catatan terakhir.

Pulau Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, Irian Jaya, mengalami masalah yang sama dengan yang dihadapi oleh pulau Sumatera. Namun kesemuanya berhasil diatasi sebagai dampak positif dari Pembangunan Nasional di Daerah. Pembangunan Nasional di Daerah Timor Timur sebagai propinsi ke-27, agak lain sifatnya dari propinsi yang lain. Timor Timur harus mengejar ketertinggalannya, dan berhasil dilaksanakan.

Sejarah mencatat, betapa pembangunan di suatu propinsi ternyata dilaksanakan pula di propinsi yang lain. Tak ada propinsi yang dianak emaskan atau dianak tirikan. Pembangunan Nasional di Daerah, bukan dipusatkan di pulau Jawa saja, tetapi sampai ke seluruh pelosok Tanah Air dari Sabang sampai dengan Merauke. Sesuai yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), guna menciptakan masyarakat Indonesia yang makmur dan berkeadilan sosial yang merata. Hal ini merupakan kerja besar untuk mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, dengan azas-tunggal Pancasila dan Undang-undang Dasar '45.

Buku INDONESIA MEMBANGUN mengetengahkan segenap pembangunan yang menyangkut sosial ekonomi, serta pembangunan bidang budaya dan politik. Begitu pula pembangunan Inpres Tingkat I, Tingkat II, Penghijauan, Pasar, Desa, Sekolah Dasar dan Inpres menyangkut spiritual. Dasar pokok pembangunan sektoral seperti Pertanian dan Pengairan, Industri dan Penanaman Modal, Pertambangan dan Energi, Perhubungan, Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Perdagangan, Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Agama, Pendidikan/Kesejahteraan Sosial serta Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Daerah/Desa/Kota serta Keagrariaan, Hukum, Penerangan dan Komunikasi Sosial, Pengetahuan/Tehnologi/Penelitian, begitu pula Sektor Lingkungan Hidup. Proyek-proyek vitaal yang mendukung bersifat strategis, tentu saja mendapat porsi tersendiri dalam menampilkannya.



land agriculture, and even transmigration. The problem of population growth is mainly handled by family planning programme.

The results have been nothing less than spectacular. To cite but an example, the over-crowded Java has achieved self-sufficiency in food supply. What is more, development activities are carried out in all 27 provinces of Indonesia to realize the ideals of Independence of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. Even East Timor, the youngest province, has been successful in making up for lost time.

The publication of this a book, containing a comprehensive infor-




















Banyak waktu yang tersita dalam menghimpun data-data dan fakta-fakta Pembangunan Daerah dari Sabang sampai dengan Merauke, tak sedikit pula dana yang harus diceburkan untuk suksesnya usaha menerbitkan buku ini. Tak sedikit perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara yang memperlihatkan partisipasi aktif-nya, yang dimanfaatkan oleh Tim Penerbitan Buku INDONESIA MEMBANGUN untuk menghadirkan buku ini.

Kita sampaikan terima-kasih kepada sejumlah hotel di Surabaya antara lain Elmi dan Simpang, di Semarang yakni Telomoyo, Dibya Puri serta Siranda, di Padang adalah Pangeran dan Mariani, di Medan Hotel Tiara, di Jakarta Hotel Sabang, serta di Bandung Hotel Homann dan Istana.

Maskapai penerbangan nasional, juga telah berpartisipasi aktif dalam usaha menjangkau daerah, yakni Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara Airlines (MNA).
Kemudahan didapat dari seluruh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II berikut jajarannya, Kanwil Deppen seluruh Indonesia (termasuk Kakandep Tingkat II) Bappeda dan para Kakanwil serta Dinas.

Foto-foto menyangkut pembangunan kita himpun dari Sekretariat Negara, LKBN 'Antara', Humas-humas Pemda, PWI Pusat dan PWI Jaya, Bunga-bunga Bangsa, Ditjen Pariwisata, PT Bogasari, Maj Pertamina, Indonesia Magazine, Maj Mutiara, Maj ASRI, sejumlah Travel Biro incl Travel Indonesia, Maj Selecta, Maj Kartini, Maj Famili, Maj Sarinah, Maj Panji Masyarakat, yang kesemuanya ada yang dieskpos untuk konsumsi umum.

Kerja kolektif yang dilaksanakan oleh Tim Penerbitan Buku INDONESIA MEMBANGUN diharapkan mampu menghadirkan buku dalam kaitan menyebarkan secara luas tentang pembangunan, menerangkannya dengan kelengkapan fakta yang akurat, disamping memperlihatkan betapa tata-cara untuk menerangkannya pun telah turut mengalami pembangunan.

Kesemuanya dipersembahkan untuk cermin bagi langkah kita dalam Pelita V yang segera dijalankan, sebagai persiapan untuk lepas landas pada Pelita VI.

Penerbit.



mation on the National Development with a period spanning almost 20 Years, obviously requires a sizable amount of fund. In this regard, State-owned as well as private enterprises have been invited to actively participate in the financing of this publication.

Acknowledgement is hereby extended to the following : ***Elmi*** *and* ***Simpang*** *hotels in Surabaya,* ***Telomoyo, Dibya Puri*** *and* ***Siranda*** *hotels in Semarang,* ***Pangeran*** *and* ***Mariani*** *hotels in Padang, Tiara Hotel in Medan, Sabang Hotel in Jakarta, as well as* ***Istana*** *and* ***Homann*** *hotels in Bandung; Garuda Indonesia and Merpati Nusantara Airlines.*

Some of the photoes are supplied by courtesy of the State Secretariat, ANTARA News Agency, Public Relations Offices of the Regional Administrations, Indonesian Journalists Association (Central Executive and Jakarta Branch), TV-RI, RRI, Bunga-bunga Bangsa, Directorate General of Tourism, PT Bogasari Flour Mill, Pertamina Magazine, a number of travel bureaus including Travel Indonesia, Selecta Magazine, Kartini Magazine, Famili Magazine, Sarinah Magazine, Panji Masyarakat Magazine, etc.

May this book, "INDONESIA DEVELOPS", become a valuable source of information as well as a treasure house of photoes on the National Development of Indonesia.

Jakarta, April 1988

The PUBLISHER

PARTISIPASI BUMN, BUMD dan PERUSAHAAN SWASTA

Filter Kretek Cigarettes

STAFF

INTERNATIONAL





Awal kemajuan dalam penampilan
dan kepuasan sempurna
Rokok Kretek Filter

PT GENTONG GOTRI - SEMARANG

Selera pas – Pilihan tepat

KELAPA GADING PERMAI
Semakin Lengkap Semakin Elite

Kelapa Gading Permai, kini berkembang pesat menjadi kawasan permukiman elite, dengan fasilitas pendukung paling lengkap di wilayah Jakarta Utara-Timur. Sekolah, pasar Mandiri, supermarket, pertokoan, dan sedang dibangun Kelapa Gading Plaza. **Sarana olahraga:** kolam renang, lapangan tenis-bulutangkis-squash, fitness centre. **Sarana rekreasi:** Taman Hiburan Mandiri, dengan Istana Hiburan Mustika & air mancur musik, Taman Rekreasi Khayangan, kolam pancing, Restoran Gading Kuring, Pasar Burung-Ikan-Tanaman hias. **Sarana lainnya:** Klinik Medikarya yang buka 24 jam, 5 apotek, unit pemadam kebakaran, kantor pos, penjagaan keamanan lingkungan 24 jam. **Fasilitas kredit** PT Papan Sejahtera sampai 15 tahun. Citibank 2-8 tahun.







DSA 0016 A ©

P.T. SUMMARECON AGUNG

Jl. Perintis Kemerdekaan 42 Jakarta Timur. Tel. 4892107 (5 saluran)
Kantor Pemasaran Proyek
Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok TN 2 No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara


P.T. KURNIA DJAJA ALAM
INDONESIA



Di balik sekeranjang mutu prima makanan lezat ini, tahukah anda bahwa ...

..... bahwa produsennya adalah Inbisco Group ?
Dan bahwa Inbisco telah berpengalaman memproduksi makanan sejak tahun 1948 ?

Sebagai pemimpin dalam industri makanan di Indonesia, Inbisco giat memproduksi beragam biskuit, kembang gula serta coklat, baik produk lokal maupun produk-produk internasional ternama dibawah lisensi seperti Kjeldsen Butter Cookies dari Denmark, Meiji dari Jepang.



Sebagian besar merek-merek makanan produksi Inbisco Group sukses meraih posisi teratas di pasaran.

Saat ini Inbisco Group terdiri dari tiga divisi utama yaitu : Divisi Pengolahan dan Pemasaran, Divisi Penjualan dan Distribusi serta Divisi Ekspor-Impor.



Setiap Divisi dilengkapi dengan fasilitas moderen.
Divisi Pengolahan misalnya, dengan sarana yang dimilikinya mampu memproses dari bahan mentah hingga menjadi produk makanan yang dapat dinikmati konsumen.
Fasilitas Litbang Inbisco tak kenal lelah melakukan penelitian dan pengembangan produk maupun kemasan-kemasan baru. Selain itu, Inbisco juga memanfaatkan tenaga-tenaga ahli dari Italia, Jepang Swiss, Inggris dan Amerika Serikat di bidang produksi, pengawasan mutu dan juga pemasaran.

Dalam mutu, Inbisco menyadari sepenuhnya bahwa konsumen semakin pandai memilih produk yang berkualitas tinggi. Dan untuk memenuhi tuntutan ini, Inbisco senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas dari seluruh produknya.

Setelah sukses di pasar lokal, Inbisco melebarkan penyebaran produknya ke mancanegara. Suatu langkah pemasaran yang semakin mengukuhkan predikatnya sebagai supplier yang bisa diandalkan di pasar internasional.

Di dalam negeri armada penjualan Inbisco juga dapat membantu anda mendistribusikan produk-produk anda di seluruh Indonesia.



Inbisco merupakan mitra usaha anda yang paling tepat, baik dalam industri pengolahan maupun distribusi barang makanan di Indonesia.

INBISCO

Jl. Daan Mogot Km. 18 Jakarta – Barat Indonesia
P.O. Box No. 40/JakGG Tel. : 611499
Tlx. : 45864 Biscon IA Fax. : 0062-21-610463.

"Kalau Anker, kapan pun jadi."

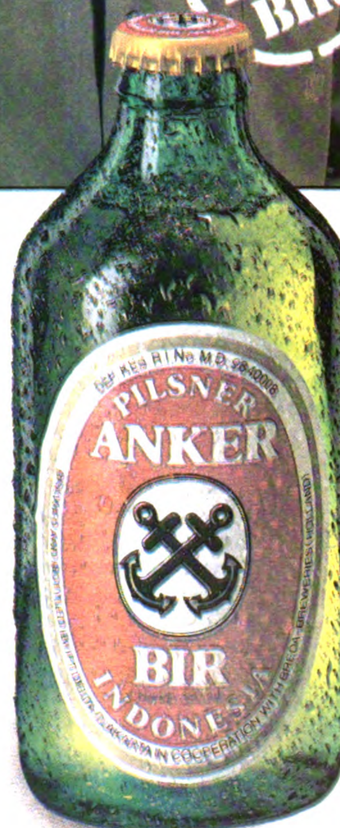
INI BARU BIR



"Saya minum bir untuk kepuasan. Dan saya menemukannya hanya pada Anker. Tegar dan menyegarkan. Sebagaimana harusnya rasa bir. Angkat Anker. Anda pasti setuju. Bir belum terasa bir kalau bukan Anker.
Tawarkan pada saya Anker. Saya angkat kapan saja."



ANKER BIR



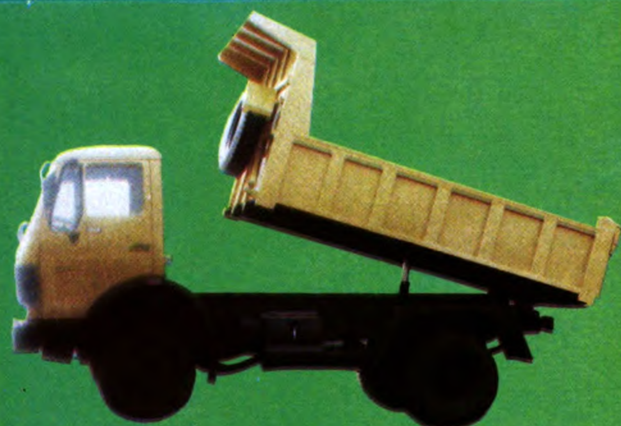
KERAMIK BANGUNAN & RUMAH TANGGA

superItalia

SENI MENJADI KENYATAAN

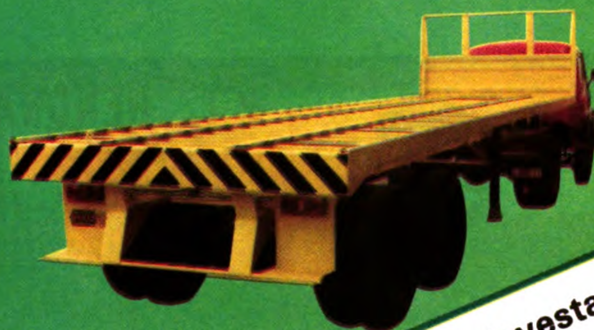
Jenis keramik bangunan Superitalia yang lengkap (FWT,OFT,SK) untuk segala lantai/dinding interior maupun exterior, highrise facing, open plaza dan lain-nya, ikut berpartisipasi mensukseskan derap pembangunan Indonesia.

PT SERINCO DJAYA MARMER INDUSTRIES
Jl. Kopi 34, JKT 11230 | Tel. 671813, 675419, 677056
Telex. 42763, 42697 HUTAN JKT. Fax. (21) 611102









Penunjang Keselamatan Investasi Dalam Usaha Transportasi Trailer, Semi Trailer, Box Van, Platform, Dump Body, Tangki, Tronton.

RUDY

P.T. RUDY DARMA ENGINEERING
Jl. Demak 170 Telp. 470481-84, 470386, Telex: 34201 HATONO IA
SURABAYA
Cabang: Jl. Daan Mogot Km I, No. 99 Jakarta
Telp.: 5605200

Digitized by Google

Digitized by Google

Let Cilandak Commercial Estate solve your problem

Ideally situated just 12 kilometres from the heart of Jakarta, CILANDAK COMMERCIAL ESTATE offers suitable premises for investor' site of operations. Here, on a 12-hectare pollution-free green belt area, are 35 spacious buildings available for lease and suitable for all types of operations : modern offices, storage and factory, workshop.

Already, many well-known names are established there-Caterpillar, Rio Tinto, Roberston Research, and Sucofindo among them-, all with premises adapted to suit their specific needs.

Most important, all facilities are immediately available water, power, air-conditioning, telephone, telex, security, sport facilities, restaurant, gardens; in fact, everything needed for a truly viable production. Communications facilities, both local and international, are also available.

The Estate has well-planned bitermen and concrete roadways which provide maximum allowance for vehicle movement. All buildings have ample access for loading facilities and numerous parking areas provide adequate space for vehicle parking.

Last but not least, the area is guarded by round-the clock security services. Manned security posts are located at strategic points around the perimeter of the Estate.

The Estate has accommodated 35 companies, thus producing a sizable amount of taxes since 1974. Employees and workers unite in a cooperative to step up their welfare. And as regard social contribution, the Estate has participated in environmental regreening.



PT. BHUMYAMCA SEKAWAN
Cilandak Commercial Estate

Cilandak, P.O. Box 01 CCE. Jakarta 12560 Indonesia. Telp. 781301/2 (Operator), 782459 (Direct), 765522 (Residence) Telex : 47144 Bhusek IA, Facsimile : 62 (21) 782369

A Joint Venture:



P. T. Halmahera Kayu



Sime Darby Berhad





GEDUNG ARTHALOKA

Dibangun dengan Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri guna meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri.

LOKASI

Gedung Arthaloka dibangun disalah satu sisi Jalan Jenderal Sudirman, lintas perkembangan dunia usaha di Jakarta.

SARANA

- Bank
- Telepon dan telex
- Parkir untuk 450 mobil
- Sentral AC
- Listrik Generator
- Cleaning Service
- Security 24 jam
- Restaurant

Manajemen

Gedung Arthaloka ditangani oleh Manajemen yang berpengalaman dalam bidang gedung Perkantoran.

HUBUNGI : Manajemen Gedung Arthaloka
Jl. Jend. Sudirman No. 2, Telp. 583919



P.T. ALPHA AUSTENITE

Producers of :

- Special welding electrode for repair and maintenance under licence MESSER GRIESHEIM GmbH - West Germany
- Bronze - Solid & Hollow Bars, produced by way of Continuous Centrifugal Casting Process
- Dies & Moulds for plastic industry, aluminium industry, glass industry etc.







Sole agent :

P.T. TIRA AUSTENITE

Head Office : Industrial Estate Pulogadung Jl. Rawagelam III No. 5
Telephone : (021) 4893208, Telex : 49290 TIRAUS IA,
Cable : AUSTENITE JAKARTA, P.O. Box 010 JAT,
Jakarta 13001 - Indonesia

Bankers : Bank Bumi Daya, European Asian Bank,
Algemene Bank Nederland



P.T. ATLANTA ARUPADHATU

PERENCANA ARSITEK, TEKNIK UMUM
PENELITIAN TANAH & SURVEYOR GEODESI

KANTOR PUSAT

JAKARTA : Jl. Utan Kayu no. 20A Jakarta, Telpon 8581298, 8581298, 8581298, 882371.
TELEX : 48364 tetomat ia FAX : 881536

BANDUNG : Jl. Rajawaii Timur no. 283 Bandung. Telpon 614283
Bank : Bank Negara Indonesia 1946, BUKOPIN, DUTA.

Kantor-kantor Cabang :

Prop. SUMATERA UTARA :
Jl. Ramelan Yatim No. 1 B
Telp. (061) 322374 Medan.

Prop. SUMBAR / RIAU
Jl. Bangkuang No. 4
Telp. (0751) 28491

Prop : SUMSEL / LAMPUNG / BENGKULU :
Jl. Aiptu K.S. Tubun No. 70
Telp. (0711) 22601 Palembang

Prop. JABAR :
Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 7
Telp. (022) 78301 Bandung

Prop. JATENG :
Jl. Bulustalan IV No. 650 C
Telp. (024) 313676 Semarang

Prop. JATIM :
Jl. Margorejo Raya No. 52-69 E.
Telp. (031) 814099
Wonocolo Surabaya

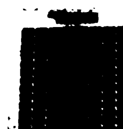
Prop. SUL SEL :
Jl. Johar No. 5
Telp. (0411) 84556 Ujung Pandang

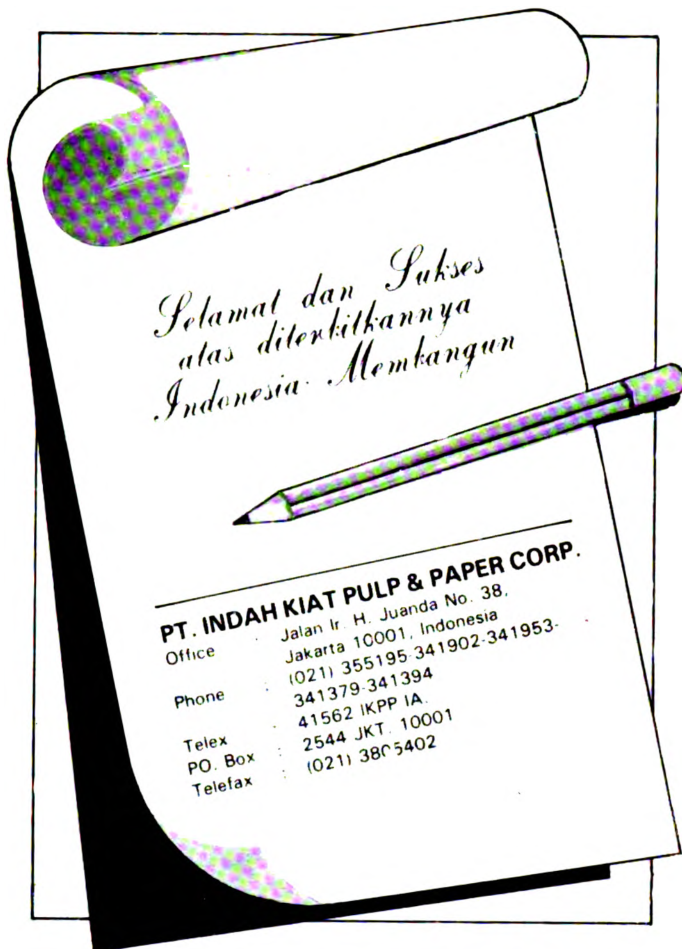
Prop. NTT / TIM - TIM :
Jl. Eltari No. 28
Telp. (039) 21835 K u p a n g

Prop. KALBAR :
Jl. K.H.A. Dahlan No. 83 A
Pontianak

Bidang Pekerjaan :
- Perancangan 'Perencanaan' Pengawasan
- Manajemen Konstruksi
- Surveyor Geodesi
- Penelitian Mekanika Tanah
- Furniture Design






Selamat dan Sukses
atas diterbitkannya
Indonesia Membangun
PT. INDAH KIAT PULP & PAPER CORP.
Office : Jalan Ir. H. Juanda No. 38,
Jakarta 10001, Indonesia
Phone : (021) 355195-341902-341953-
341379-341394
Telex : 41562 IKPP IA.
PO. Box : 2544 JKT. 10001
Telefax : (021) 38C5402


analisa
Peserta KB Lestari Agar
Jadi Pelopor KB Mandiri

















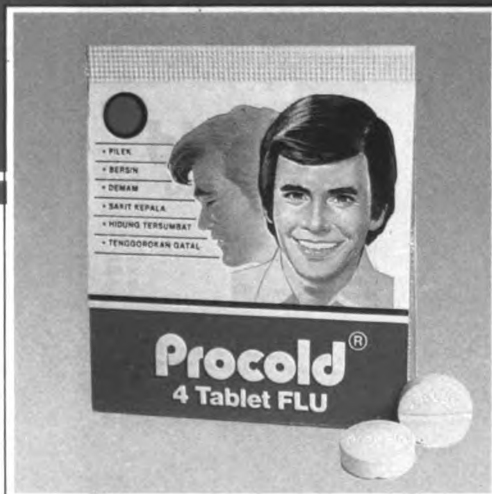






SENTOSA
SENTOSA
SENTOSA





Procold®

Procold cepat kerjanya, aman dan terbukti paling ampuh dalam membasmi gejala flu :
Pilek, bersin, demam, sakit kepala, nyeri, hidung tersumbat dan tenggorokan gatal.

Procold®
obat andalan untuk membasmi flu !





KING'S
COLOUR PHOTO STUDIO

STUDIO KAMI MELAYANI :
1 Pemotretan:
- wisuda
- Perkawinan
- keluarga, dll.

berikut penyewaan pakaian pengantin dan tata rias

2 Pembesaran foto dengan kualitas tinggi

3 Pembesaran foto pada kanvas nan anggun

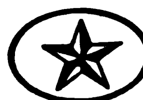
UNTUK FOTO YANG BAIK ?
HUBUNGI KAMI DI :





- Jl. K.H. Hasyim Ashari 36
  Telp. 345602 - 365836
  Jakarta Pusat
  P.O. BOX 2698

- Jl. Mangga Besar Raya 42D
  Telp. 6297501
  Jakarta Pusat



P.T. FIVE STAR INDUSTRIES LIMITED

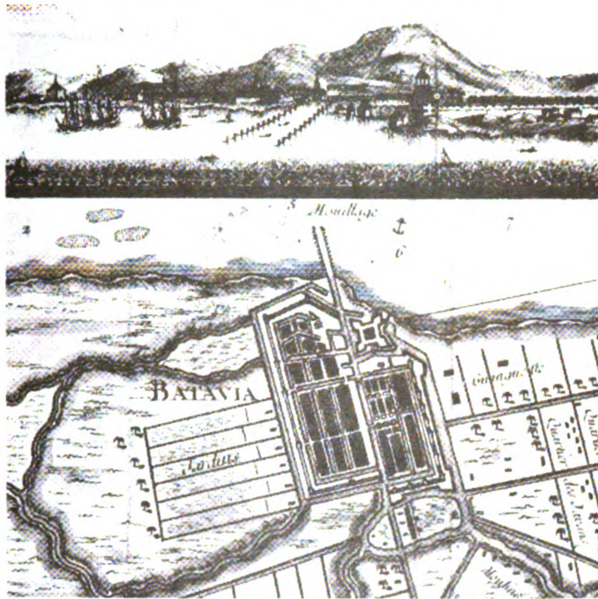
Jl. Cipaganti 184, Bandung 40131, Telp. 81007.
TLX: 28232 Fv Star IA

FACTORY :
Jl. Raya Rancaekek Km 23 Kecamatan Cikeruh,
Kabupaten Sumedang, Telp. 430643, 87646,
TLX: 28471 Fv Star IA

— Range of Manufacture : —

FOR EXPORT AND LOCAL.

1. POLYESTER/VISCOSE and POLYESTER/COTTON YARN for Weaving and Knitting.
2. Wide Width fabrics for Bed Sheets, Bed Covers, Table Cloth, Curtain materials etc. In dyed, Printed and Embroidery. Specialised in special panel prints.
3. Various types of embroidered fabrics, Laces, Collars, etc.
4. Accept Processing Job Work for dyeing and PRINTING on Wide Width Italian Flat Bed Screen printing machine.



WE'VE CHANGED THE FACE OF JAKARTA.





When the Jakarta Hilton International first opened it was a little way out of the city. This gave us more room, so our guests could relax in our private grounds.

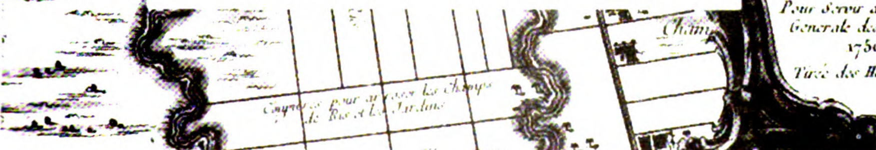
Over the years however, things have changed. Not our spaciousness, we still have our 32-acre gardens, but the face of Jakarta itself. The city has moved to us so we are now right in the heart of the new business districts.

Perhaps it's the attraction of our tranquil luxury, impeccable service and superb business amenities. Or could it be our splendid array of recreational facilities.

Whatever it is, when you come and experience Jakarta's premier hotel you'll realise that it was a smart move.

For reservations, call your travel agent, any Hilton International hotel or Hilton Reservation Service.





JAKARTA
HILTON INTERNATIONAL



suara irama indah

101.25 MHz

fm Stereo



CITIBANK ANDA

Keahlian bank terkemuka di dunia, untuk setiap kebutuhan perbankan pribadi anda.

Kehadiran Citibank di lebih 100 negara memungkinkan kami untuk mengembangkan keahlian yang tidak saja terkemuka di dunia, tapi juga mampu memenuhi setiap kebutuhan perbankan yang unik di setiap negara.

Kini, keahlian ini kami pacu untuk mendukung setiap layanan guna memenuhi setiap kebutuhan perbankan anda.

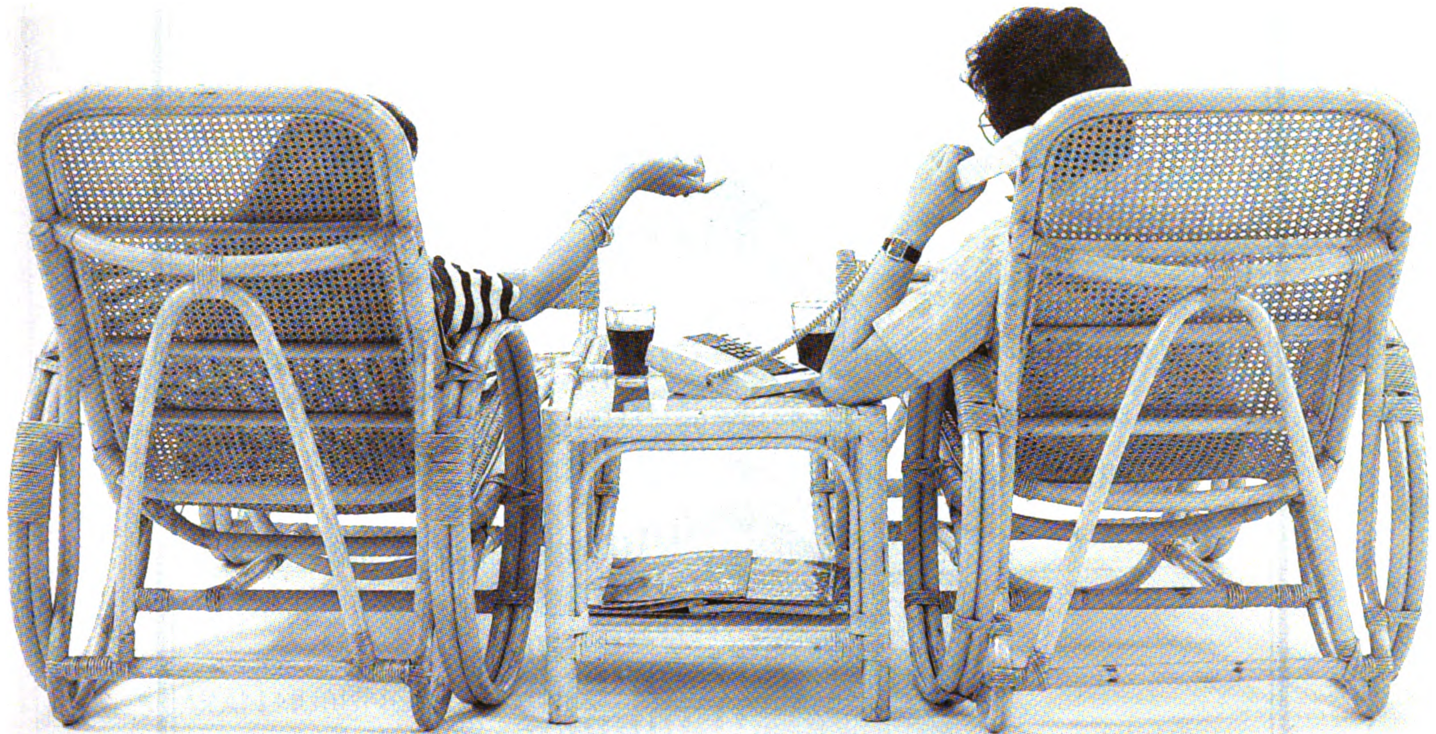
Apa pun kebutuhan perbankan anda, staf kami akan melayani anda tidak saja dengan keahlian bank terkemuka di dunia, tapi juga dengan layanan ramah tersendiri.

CITIBANK
BANK TERKEMUKA DI DUNIA

Cabang Utama: Landmark Center Jl. Jend. Sudirman Kav 70 A, Tel 5782-007 atau 5782-418. ● Cabang Pembantu: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.14, Tel.515-155

"Kan hari ini ada urusan dengan Bank, Mas ?"

"Iya, ini sedang kulakukan. Hallo,...Chase Manhattan..?"



Bank-Via-Telepon hanyalah satu dari sekian keuntungan Rekening Koran Chase

Pelayanan eksklusip Bank-Via-Telepon kami memungkinkan Anda untuk melaksanakan berbagai transaksi keuangan, seperti permintaan buku cek, wesel, travelers cheques, pembayaran kartu kredit, membuka Deposito Berjangka dan/atau Call Deposit, tanpa harus setiap kali mengunjungi Bank. Semua transaksi melalui Bank-Via-Telepon dilaksanakan dengan penggunaan kata rahasia (password) khusus yang hanya diketahui oleh Anda dan Chase.

Cara termudah untuk melaksanakan transaksi keuangan pribadi Anda, adalah dengan membuka Rekening Koran Chase - yang terjamin penuh kerahasiaannya.

Anda dapat membuktikannya sendiri ! Hubungilah Customer Service kami via telepon 5782213, dan kami akan berikan semua informasi yang Anda butuhkan mengenai Rekening Koran Chase dan pelayanan Bank-Via-Telepon kami.

Jam Buka : 08.00 – 14.00 Senin - Jum'at.
08.00 – 11.00 Sabtu.

The Chase Manhattan Bank, N.A.
Chase Plaza, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta Selatan, Tel. 5782213

Kantor Cabang : Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta Pusat, Tel. 374008



CHASE
Consumer Banking Group

Pribadi Wanita Indonesia

Anda tahu siapa Anda
Anda tahu tujuan hidup Anda
Anda memiliki kepribadian
Selaras, serasi dan seimbang

Dalam wawasan dan penampilan
Dalam sikap dan tindakan
Dalam kebersamaan keluarga
Dan kemandirian

Orang seperti Anda
Akan menemukan pesona pribadi
Dalam majalah Sarinah



B&B-C.106

Ingat beras, ingat *Cosmos*

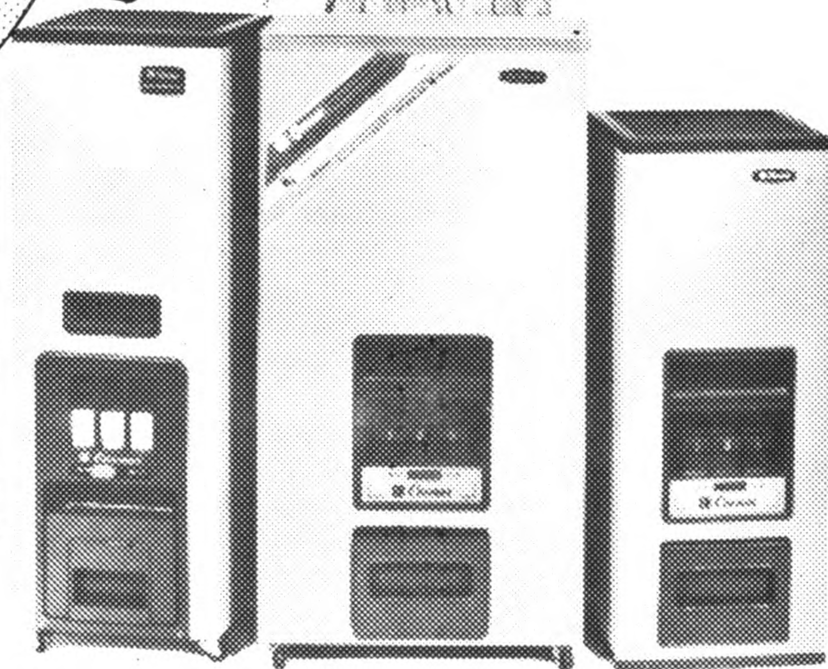
Awas Tiruan

2 Sejoli





2 liter, hanya 300 watt



Memang nyata.

Urusan beras, urusan Cosmos.

Dari menyimpan beras sampai menanak nasi serahkan sàja kepada Cosmos ahlinya. **Keduanya dengan cara yang betul-betul hemat.**

Hanya Cosmos pencipta sarana penyimpan beras membuat beras terjaga aman, kering, bersih dan pulen.

Rice Cooker Cosmos hanya 300 Watt, hemat. Voltasi ganda.

Star Cosmos Ltd.

Glodok Plaza Blok A No. 3 Telp. 6298109 Jakarta Kota

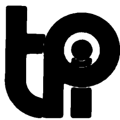


Ready-Made or Made to Measure



Whatever the measure of your business, there is a TPI Insurance policy tailored to your needs .... in a way that is designed to be flexible and simple.

You know how TPI cares for you. You have therefore every reason to talk to us for details.



P.T. TUGU PRATAMA INDONESIA
Our Service Means your security
GEDUNG PATRA LANTAI I
JALAN GATOT SUBROTO KAV 32–34
JAKARTA SELATAN INDONESIA
TELEPHONE : 512041; 512293; 512468; 512654
TELEX : 62800 – 62809 GUTAMA IA
FAX : 62-21 – 517152



TUGU INSURANCE CO., LTD.
21 Sunning Plaza
Hysan Avenue
Causeway Bay
Hong Kong
TELEPHONE : 5-5956757
TELEX : HX 73055
FAX : 00852-576-3245









Pelita Air Service membuka cakrawala hidup baru yang lebih sejahtera dalam pelestarian budaya Bangsa



PT. PELITA AIR SERVICE



Jl. Abdul Muis No. 52-54, Jakarta Pusat. Telepon. 375908 (6 saluran) Telex: 46462 PELITA

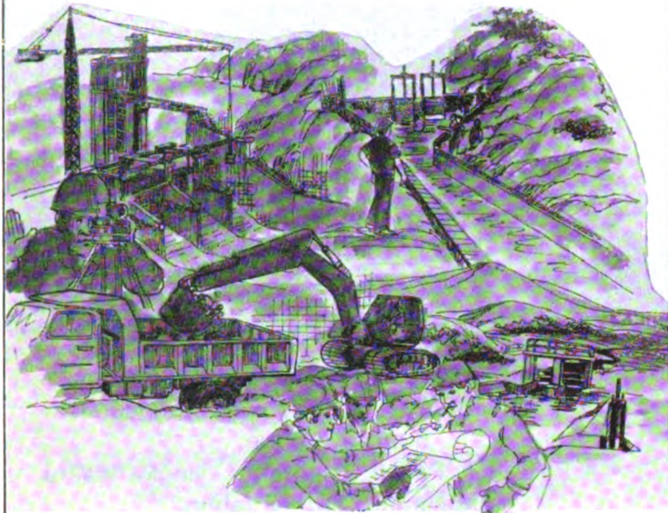


P.T. ADHI KARYA (PERSERO)

GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR

Kantor Pusat : Jl. Raya Ps. Minggu Km. 18 Jakarta Selatan
Telp. : 7990965 P.O.Box 31/PSM Tlx. 47563 ADHI IA

Cabang-cabang :



P.T. "Pura Raya" · P.T. "Pura Barutama" · P.T. "Pura Este" · P.T. "Pura Baruda"

Hubungilah kami untuk kebutuhan anda di bidang :

- ★ OFFSET & ROTOGRAVURE PRINTING
- ★ CORRUGATED & MICROFLUTE BOXES
- ★ CONVERTING & FLEXIBLE PACKAGING
- ★ NCR / SCP PAPER.

produksi dalam negeri

Pusat :
- Jl. AKBP Agil Kusumadya 203, Kudus — Indonesia.
  Phone : (0291) 21822, 22223 — 6 Telex 22296 pura ks.
- Jl. Kresna, Kudus — Indonesia.
  Phone : (0291) 22586, 22483 — 6 Telex 22295 pura ks.

Perwakilan Jakarta :
Jl. Palatehan I/39 A, Keb. Baru
Jakarta — Indonesia
Phone (021) 710998, 735416
(021) 714641, 717480
Telex 47194 pura ia

Perwakilan Surabaya :
Jl. Manyar Tirtomoyo IX/6
Surabaya — Indonesia
Phone (031) 60943
Telex 31695 pura sb



p.t. SARANG TEHNIK

HEAD OFFICE
3 Jln. Ir. H. Juanda
JAKARTA - INDONESIA

GENERAL CONTRACTOR • ENGINEERING • GENERAL SUPPLIER IMPORTER • INDUSTRY
PHONE : 349874 - 364198 - 358730 - 358656 - 354198 - 364199 - 358732 - 358733

Sejak tahun 1963 p.t. Sarang Tehnik
Telah Turut Berpartisipasi Dalam
Pembangunan Di Indonesia
Dalam Kurun Waktu 23 Tahun
p.t. Sarang Tehnik Telah Banyak
Menyumbangkan Karya-Karya Dalam
Berbagai Bidang.

- Pekerjaan Sipil :
  - Bangunan Irigasi, Jembatan, Jalan
  - Bangunan Gedung, Industri
- Pekerjaan Instalasi :
  - Listrik - Pembangkit - Distribusi - Transmisi - Sound System
  - Telekomunikasi : Telephone
  - Mekanik - Plumbing - Air Conditioning - Steam boiler - Watertreatment
  - Elevator & Escalator
- Trading/Importer-Exporter
- keagenan :

HITACHI	J.C.B.	NEI	MATAL
Elevator, Escalator	Alat-alat Besar	Peralatan listrik	Proses Pengawetan Pangan
			

---

ppm

mitra pembangunan di bidang manajemen

PT Binaman Utama
KONSULTAN MANAJEMEN



Alcan : adalah pabrik yang menghasilkan aluminium extrusi dengan warna anodisasi (anolok dan inca) yang bermutu paling tinggi

Alcan : memberikan pelayanan untuk design-design arsitektur extrusi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan anda.

Alcan : produsen bentuk-bentuk atap dan dinding aluminium yang sangat cocok untuk penggunaan bangunan-bangunan perumahan dan industri.

Alcan : adalah spesialis pembuat bahan jadi aluminium untuk komponen-komponen industri, transport, gedung/perumahan yang bervariasi baik bentuk maupun permukaannya.

P.T. Alcan Indonesia

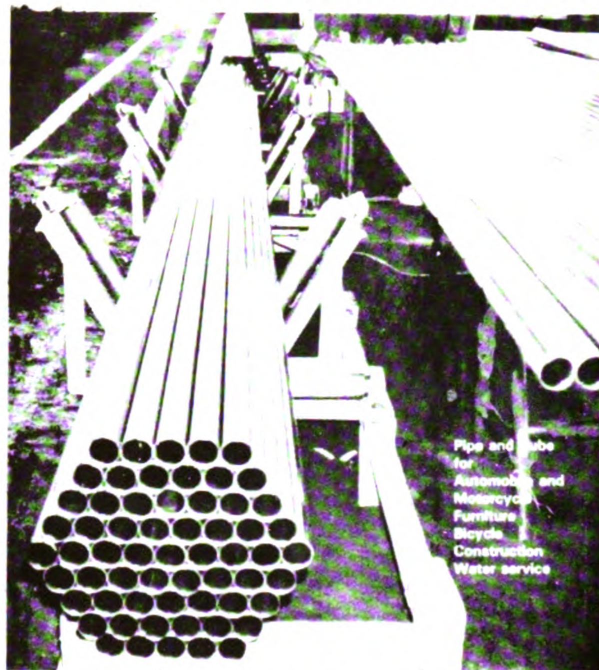
Jl. Pulogadung 4, P.O. Box 3127, Jakarta
Telephone : 4893635 (10 lines) Telex : 48180
Telecopier : 4898054



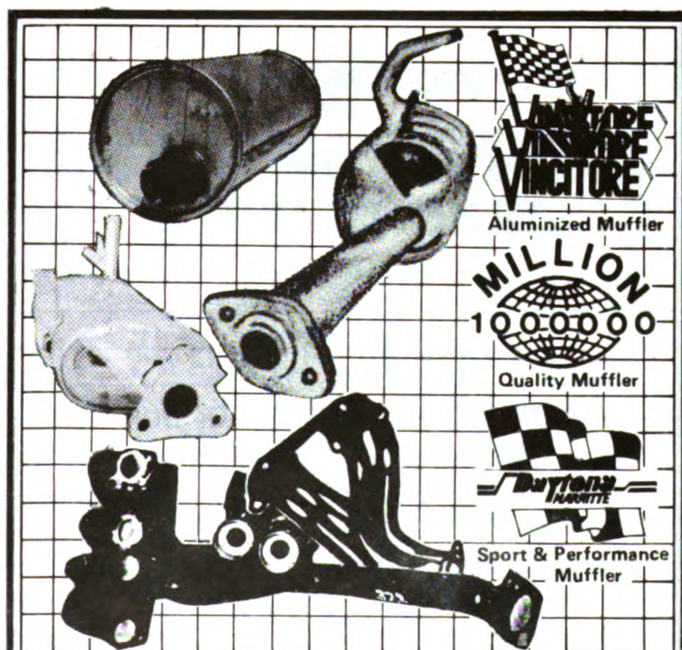
Joint Venture Indonesia - Japan

P.T. INDONESIA STEEL TUBE WORKS LTD.

Jl. Simongan 105 Semarang, Jawa-Tengah, Indonesia
P.O. Box 35, Phone (024) 312355 - 312362
Telex : 22-288, Fax : (024) 312355



Peran serta kami dalam menunjang Pembangunan Nasional



MANUFACTURER OF :
– MUFFLER, EXHAUST PIPE, DIE MAKING & STAMPING PLANT:

PT CIPTA SAKSAMA INDONESIA

Jl. Raya Bekasi Km. 23 Cakung Telp. (021) 4891043, 4881238, 4881239
Facsimile Number : CSI 62-021-4881237 PO. BOX : 337/JAT
Jakarta Timur - Indonesia

P.T. RUANG KENCANA KNALPOT
One of the dealers & workshop in Jakarta.
Jl. Garuda No. 74 Jakarta. Phone : (021) 410-714 413926

P.T. SERMANI STEEL CORPORATION



MENUNJANG RENCANA PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAN RAKYAT INDONESIA-DIBIDANG PEMBANGUNAN GEDUNG2, -SEKOLAH2, ASRAMA2 DAN PERUMAHAN RAKYAT.





PT. BINA LESTARI & Kelompok

Didirikan : 3 April 1973

Alamat :Gd. Manggala Wanabakti Blok IV/3
Jl. Gatot Subroto, Jakarta-10270
Cabang :Riau, Lampung, Jambi, Kaltim, Jabar, Jateng, Jatim.

Bergerak dalam bidang :

Pengusahaan Hutan-Perdagangan Kayu/Hasil Hutan-Industri Kehutanan Survey Hutan-Jasa Konsultansi Kehutanan
(Pembuatan RKT/RKL, Penyusunan Studi Kelayakan Kehutanan dan Lain-lain).

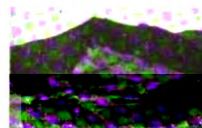


P.T. KARIMUN GRANITE

JALAN TEUKU CIK DITIRO NO. 84 P.O. BOX 3749 JKT. JAKARTA 10002, INDONESIA TEL. 327918, 330117, 337632. TELEX : 61743 KAGRA IA.

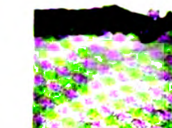
G R A N I T ...!!!

SUMBER KANDUNGAN GRANIT



* APA ... GRANIT ITU ?
Jenis batu terkeras yang muncul dari perut bumi hingga memiliki keistimewaan khusus. Itulah granit !

* APA ... KEISTIMEWAANNYA ?
Memiliki warna-warni yang indah laksana batu permata serta tahan terhadap : goresan, kikisan, lapukan dan beban apapun, sehingga dikatakan lebih ampuh dari jenis-jenis batu lain yang digunakan saat ini.



GAMBAR I

* UNTUK DIGUNAKAN APA SAJA ?
- Jenis pecah digunakan untuk : fondasi, cor beton, gedung-gedung, jalan raya, lapangan terbang, tanggul pemecah ombak pantai dan lain-lain bangunan permanen.

GAMBAR II

- Jenis belah & poles digunakan untuk dinding utama yang berpamor antik dan anggun, atau lantai-lantai elite yang tahan gores, hingga memperkecil biaya perawatan.

* DIMANA GRANIT INDONESIA DITAMBANG DAN DIOLAH ?
PULAU KARIMUN adalah satu-satunya wilayah Indonesia yang menghasilkan dan mengolah jenis granit terbaik saat ini.



GAMBAR III

memang **LUAR BIASA**

KALAU BEGITU KITA PILIH GRANIT SAJA!

Cabang :
15, West Coast Highway #03-15 to 03-17
Pasir Panjang Wharves Bldg. Singapore 0511
Tel. : 7795766 (4 lines) Telex : RS. 33443 PTKG.

Quarry :
Pasir Panjang, Tanjung Balai Karimun
Kepulauan Riau.



P.T. SANKYU INDONESIA INTERNATIONAL

Summitmas Tower, Jl. Jend. Soedirman Kav. 61 - 62 Jakarta - Indonesia
Telp. 588231, 588232, 515134. Telfax. 515137 Telex 44995 Sankyu Jkt.

LINE OF BUSINESS

- International Freight Forwarding
- Heavy Lift Transportation
- Machine Installation
- Plant Maintenance
- Fabrication

ORGANIZATION

SHAREHOLDERS	:	SANKYU INC. PT. BIMANTARA CITRA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK & GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) PT. PURNA SENTANA BAJA
MANAGEMENT	:	PRESIDENT DIRECTORS — A ONE DIRECTORS — 2 INDONESIAN — 3 JAPANESE
EMPLOYEE	:	2 JAPANESE OFFICE STAFF 20 INDONESIAN OFFICE STAFF 290 INDONESIA WORKERS.



KIWI®

Teman setia ibu rumah tangga

Berperan serta dalam menunjang pembangunan nasional...

PT. KIWI INDONESIA
Jl. Raya Bogor Km 27 Jakarta-Timur PO. Box 2778 Jkt


Surya
GUDANG
GARAM
16
FILTER
KRETEK CIGARETTES
MADE IN INDONESIA

